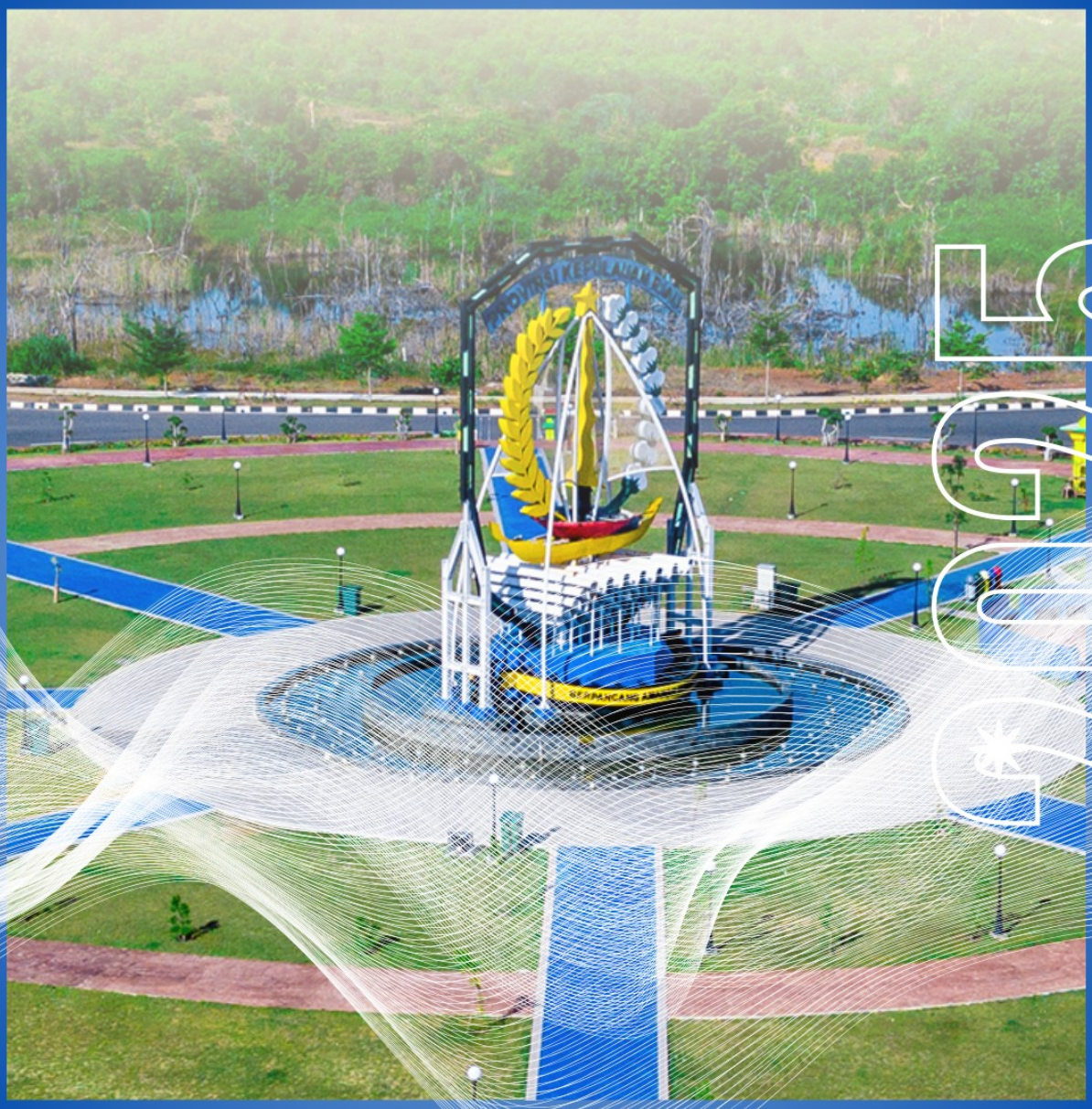
PROVINSI
KEPULAUAN RIAU



LKPD

LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN
2025

AUDITED

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan keuangan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi

akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 7.5.1.5, 7.5.3.2.1.3, dan 7.5.3.2.1.4 atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang menjelaskan bahwa perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 belum memperhatikan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah, yaitu penyusunan anggaran pendapatan daerah tidak memiliki dasar yang memadai, dan manajemen kas belum dapat mencegah gagal bayar atas kegiatan belanja Perangkat Daerah (PD), sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mampu menyelesaikan kegiatan belanja tahun berjalan. Hal tersebut terlihat dari SiLPA Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.121.577.365,93, Utang Belanja sebesar Rp205.173.955.504,00 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp4.438.973.655,37 yang membebani anggaran tahun berikutnya, dan Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulan IV ke kabupaten/kota sebesar Rp53.751.471.870,06 untuk melaksanakan kegiatan belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 23.B/T/LHP/DJPKN-V.TJP/PPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Batam, 29 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Emmy Mutiarini, S.E., Ak., M.Si., CA, CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, CFrA
Register Negara Akuntan No. 2891

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gubernur Kepulauan Riau,

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Ansar Ahmad

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GRAFIK xiv

DAFTAR GAMBAR xviii

DAFTAR LAMPIRAN xix

LAPORAN KEUANGAN 1

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 3

3. NERACA 4

4. LAPORAN OPERASIONAL 6

5. LAPORAN ARUS KAS 8

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 10

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 11

7.1. PENDAHULUAN 11

7.2. PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI DAERAH, PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH, PERKEMBANGAN INFLASI, PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM, PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH, KETENAGAKERJAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN, PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH, KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH, PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 16

7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 101

7.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI 353

7.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 458

7.6. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 848

7.7. PENUTUP 850

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 7.2.1	Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera	18
Tabel 7.2.2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Pengeluaran (%yoy)	18
Tabel 7.2.3	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Lapangan Usaha	26
Tabel 7.2.4	Anggaran dan Realisasi Pendapatan di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan IV 2025	31
Tabel 7.2.5	Anggaran dan Realisasi Belanja di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan IV 2025	33
Tabel 7.2.6	Akumulasi Anggaran dan Realisasi Belanja APBN di Wilayah Provinsi Kepri	37
Tabel 7.2.7	Anggaran Belanja Infrastruktur APBN Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	38
Tabel 7.2.8	Inflasi Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, Kota Batam	40
Tabel 7.2.9	Penyumbang Inflansi Bulanan Provinsi Kepri Desember 2025	40
Tabel 7.2.10	Penyumbang Deflasi Bulanan Provinsi Kepri Desember 2025	41
Tabel 7.2.11	Penyumbang Inflasi Tahunan Provinsi Kepri Desember 2025	41
Tabel 7.2.12	Penyumbang Deflasi Tahunan Provinsi Kepri Desember 2025	42
Tabel 7.2.13	Inflasi Tahunan Kepulauan Riau Menurut Kelompok Barang dan Jasa (% yoy)	43
Tabel 7.2.14	Andil Inflasi menurut Kelompok Barang dan Jasa di Kota Penghitungan IHK (% yoy)	46
Tabel 7.2.15	Perkembangan Indikator Utama Perbankan Kepri	51
Tabel 7.2.16	Penyaluran Kredit (Spasial)	57
Tabel 7.2.17	Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga	62
Tabel 7.2.18	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kepri	79
Tabel 7.2.19	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan	80
Tabel 7.2.20	Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri	80
Tabel 7.2.21	Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri (%)	80
Tabel 7.2.22	Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri	82
Tabel 7.2.23	Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri	82
Tabel 7.2.24	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri Menurut Komponen	85
Tabel 7.2.25	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri berdasarkan wilayah kabupaten/kota	85
Tabel 7.2.26	Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2025	87
Tabel 7.2.27	Risiko Inflasi Kepulauan Riau Tahun 2025	88
Tabel 7.2.28	Perbandingan Target Pendapatan pada APBD dan Perubahan Pergeseran APBD TA 2025	92
Tabel 7.2.29	Perbandingan Target Belanja pada APBD dan Perubahan Pergeseran APBD TA 2025	94
Tabel 7.2.30	Perbandingan Pembiayaan Daerah pada APBD dan Perubahan Pergeseran APBD TA 2025	96
Tabel 7.2.31	Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Periode 31 Desember 2025	97
Tabel 7.2.32	Realisasi Belanja per Perangkat Daerah	98
Tabel 7.2.33	Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah	100
Tabel 7.3.1	Realisasi APBD Tahun 2025	102
Tabel 7.3.2	Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2025 menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi	103
Tabel 7.3.3	Skala Pengukuran Kategori	122
Tabel 7.3.4	Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi	124
Tabel 7.3.5	Ringkasan PDRB per Provinsi di Pulau Sumatera TW IV 2025 Tahun Dasar 2010	128

Tabel 7.3.6	Program dan Realisasi Anggaran yang Mendukung Laju Pertumbuhan Ekonomi	135
Tabel 7.3.7	Capaian Rasio Gini	137
Tabel 7.3.8	Perbandingan Indeks Gini Tingkat Provinsi se-Indonesia	139
Tabel 7.3.9	Bantuan Dalam Pembiayaan Pendidikan Tahun 2025	141
Tabel 7.3.10	Jenis Bantuan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	141
Tabel 7.3.11	Program dan Realisasi Anggaran yang Mendukung Rasio Gini Provinsi Kepulauan Riau	143
Tabel 7.3.12	Capaian PDRB Per Kapita	146
Tabel 7.3.13	Capaian PDRB Per Kapita	148
Tabel 7.3.14	Data Pendirian dan Pemeringkatan BUMDes Tahun 2025	150
Tabel 7.3.15	Program dan Realisasi Anggaran yang Mendukung PDRB per Kapita Provinsi Kepulauan Riau	152
Tabel 7.3.16	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	155
Tabel 7.3.17	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	155
Tabel 7.3.18	Hasil Nilai SAKIP dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025	160
Tabel 7.3.19	Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi	162
Tabel 7.3.20	Tindaklanjut Aduan Masyarakat Aplikasi SP4N-LAPOR! Per November 2025	163
Tabel 7.3.21	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	163
Tabel 7.3.22	Perkembangan capaian Indeks Kualitas Kebijakan	164
Tabel 7.3.23	Perkembangan capaian Indeks Reformasi Hukum	164
Tabel 7.3.24	Perkembangan Capaian Tingkat Digitalisasi Arsip	165
Tabel 7.3.25	Capaian Indeks Pembangunan Statistik Sektoral Provinsi Kepulauan Riau	166
Tabel 7.3.26	Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Provinsi Kepulauan Riau	166
Tabel 7.3.27	Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	169
Tabel 7.3.28	Tren Pencapaian Nilai IPP Prov Kepri 2020-2025	171
Tabel 7.3.29	Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau	174
Tabel 7.3.30	Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka	176
Tabel 7.3.31	Karakteristik Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin dan Daerah Tempat tinggal	177
Tabel 7.3.32	Tren Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	178
Tabel 7.3.33	Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Kepri	179
Tabel 7.3.34	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD	180
Tabel 7.3.35	TPT Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan TPT	180
Tabel 7.3.36	Karakteristik Penduduk Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023 – 2025	181
Tabel 7.3.37	Karakteristik Penduduk Bekerja	182
Tabel 7.3.38	Anggaran yang mendukung penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	184
Tabel 7.3.39	Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	187
Tabel 7.3.40	Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun yang dinilai dengan Target akhir RPJMD	188
Tabel 7.3.41	Raport Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2025	189
Tabel 7.3.42	Perbandingan Raport Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional	189
Tabel 7.3.43	Pemantauan Indeks Kualitas Air	190
Tabel 7.3.44	Pelaksanaan Rehabilitasi lahan Tahun 2025	191
Tabel 7.3.45	Anggaran yang mendukung penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau	195
Tabel 7.3.46	Capaian Indeks Pembangunan Manusia	197

Tabel 7.3.47	Tren Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Dimensi 2020-2025	201
Tabel 7.3.48	Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia	212
Tabel 7.3.49	Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	214
Tabel 7.3.50	Kegiatan Pembangunan Gedung	217
Tabel 7.3.51	Jumlah Pembangunan USB Prov Kepri 2021-2025	217
Tabel 7.3.52	Pembangunan RKB di Prov Kepri	218
Tabel 7.3.53	Jumlah Bantuan Seragam Gratis	220
Tabel 7.3.54	Jumlah Bantuan Seragam Gratis	221
Tabel 7.3.55	Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Provinsi Kepulauan Riau	222
Tabel 7.3.56	Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2025	224
Tabel 7.3.57	Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2025	225
Tabel 7.3.58	Capaian Kinerja IPG Berdasarkan Provinsi se-Indonesia Tahun 2025	226
Tabel 7.3.59	Capaian Kinerja IPG Berdasarkan Provinsi se-Sumatera Tahun 2025	227
Tabel 7.3.60	Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Indeks Pembangunan Gender	232
Tabel 7.3.61	Capaian PDRB Per Kapita	235
Tabel 7.3.62	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Se-Indonesia Semester I Tahun 2025	236
Tabel 7.3.63	Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau	238
Tabel 7.3.64	Capaian Prevalensi Stunting	240
Tabel 7.3.65	Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Riau	249
Tabel 7.3.66	Capaian Rasio Konektivitas	251
Tabel 7.3.67	Data Trayek Angkutan Darat dalam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	251
Tabel 7.3.68	Data Lintasan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	251
Tabel 7.3.69	Data Lintasan Angkutan Laut Provinsi	252
Tabel 7.3.70	Perhitungan Capaian Rasio Konektivitas Provinsi Kepulauan Riau	253
Tabel 7.3.71	Perhitungan IK1 Rasio Konektivitas Angkutan Darat Tahun 2025	253
Tabel 7.3.72	Perhitungan IK2 Rasio Konektivitas Angkutan Perairan Tahun 2025	254
Tabel 7.3.73	Peningkatan, Pemeliharaan Jalan Dan Pembangunan Jembatan	256
Tabel 7.3.74	Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Rasio Konektivitas Provinsi Kepulauan Riau	258
Tabel 7.3.75	Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan	260
Tabel 7.3.76	Perbandingan Realiasasi Kinerja	262
Tabel 7.3.77	Program/Kegiatan dan Realisasi Anggaran	273
Tabel 7.3.78	Capaian Rasio Elektrifikasi	274
Tabel 7.3.79	Perhitungan Rasio Elektrifikasi Tahun 2025	275
Tabel 7.3.80	Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Rasio Eletrifikasi	278
Tabel 7.3.81	Status Ruas Jalan Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau	280
Tabel 7.3.82	Panjang Jalan Kondisi Mantap	280
Tabel 7.3.83	Capaian Persentase Jalan Kondisi Mantap	280
Tabel 7.3.84	Capaian Persentase Jalan Kondisi Mantap	281
Tabel 7.3.85	Paket Pekerjaan yang mendukung Persentase Jalan Kondisi Mantap Provinsi Kepulauan Riau	283
Tabel 7.3.86	Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Persentase Jalan Kondisi Mantap	285
Tabel 7.3.87	Dasar Perhitungan Indeks Infrastruktur	287
Tabel 7.3.88	Capaian Indeks Infrastruktur	287

Tabel 7.3.89	Perhitungan Indeks Infrastruktur	288
Tabel 7.3.90	Data Pemerataan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	289
Tabel 7.3.91	Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Indeks Infrastruktur Provinsi Kepulauan Riau	293
Tabel 7.3.92	Capaian Indeks Modal Manusia	296
Tabel 7.3.93	Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Indeks Modal Manusia Provinsi Kepulauan Riau	302
Tabel 7.3.94	Capaian Indeks Harmoni	304
Tabel 7.3.95	Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Indeks Harmoni Provinsi Kepulauan Riau	307
Tabel 7.3.96	Capaian Indeks Ekonomi Hijau Daerah	309
Tabel 7.3.97	Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Indeks Harmoni Provinsi Kepulauan Riau	313
Tabel 7.3.98	Alokasi dan realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan	315
Tabel 7.3.99	Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	319
Tabel 7.3.100	Alokasi dan Realisasi Anggaran Pengendalian Inflasi	341
Tabel 7.3.101	Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	343
Tabel 7.3.102	Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	346
Tabel 7.3.103	Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Pengawasan	348
Tabel 7.3.104	Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Standar Pelayanan Minimal	350
Tabel 7.4.1	Klasifikasi Kas dan Setara Kas	372
Tabel 7.4.2	Klasifikasi Piutang	375
Tabel 7.4.3	Kualitas / Umur Piutang	378
Tabel 7.4.4	Investasi Dana Bergulir	384
Tabel 7.4.5	Pendapatan Hasil Dana Bergulir	384
Tabel 7.4.6	Klasifikasi Persediaan	388
Tabel 7.4.7	Klasifikasi Investasi	391
Tabel 7.4.8	Metode Penilaian Investasi berdasarkan kriteria tertentu	393
Tabel 7.4.9	Klasifikasi Aset Tetap	395
Tabel 7.4.10	Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	397
Tabel 7.4.11	Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap	401
Tabel 7.4.12	Nilai Pemeliharaan Aset Tetap	404
Tabel 7.4.13	Perkiraan Masa Manfaat Aset Tetap	406
Tabel 7.4.14	Klasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	411
Tabel 7.4.15	Dana Cadangan	414
Tabel 7.4.16	Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Cadangan	414
Tabel 7.4.17	Klasifikasi Aset Lainnya	415
Tabel 7.4.18	Klasifikasi Kewajiban	436
Tabel 7.4.19	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	441
Tabel 7.4.20	Pendapatan Transfer	441
Tabel 7.4.21	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	441
Tabel 7.4.22	Klasifikasi Belanja	443
Tabel 7.4.23	Penerimaan Pembiayaan	445
Tabel 7.4.24	Pengeluaran Pembiayaan	446
Tabel 7.4.25	Klasifikasi Pendapatan - LO	447
Tabel 7.4.26	Klasifikasi Beban	451
Tabel 7.5.1	Pendapatan LRA	458
Tabel 7.5.2	Pendapatan Asli Daerah – LRA	459
Tabel 7.5.3	Pajak Daerah – LRA	460

Tabel 7.5.4	Rincian Pajak Daerah – LRA	460
Tabel 7.5.5	Rincian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LRA	461
Tabel 7.5.6	Rincian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LRA	464
Tabel 7.5.7	Rincian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA	466
Tabel 7.5.8	Rincian Pajak Air Permukaan – LRA	467
Tabel 7.5.9	Rincian Pajak Rokok – LRA	467
Tabel 7.5.10	Rincian Pajak Alat Berat – LRA	468
Tabel 7.5.11	Rincian Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)– LRA	468
Tabel 7.5.12	Retribusi Daerah – LRA	469
Tabel 7.5.13	Rincian Retribusi Jasa Umum – LRA	470
Tabel 7.5.14	Rincian Retribusi Jasa Usaha– LRA	470
Tabel 7.5.15	Rincian Retribusi Perizinan Tertentu – LRA	474
Tabel 7.5.16	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	476
Tabel 7.5.17	Alokasi Penggunaan Laba Bersih	477
Tabel 7.5.18	Perhitungan Dividen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode bulan Januari s.d Juli 2024	477
Tabel 7.5.19	Perhitungan Dividen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode bulan Agustus s.d Desember 2024	478
Tabel 7.5.20	Lain – lain PAD Yang Sah – LRA	479
Tabel 7.5.21	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LRA	480
Tabel 7.5.22	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LRA	480
Tabel 7.5.23	Jasa Giro – LRA	481
Tabel 7.5.24	Pendapatan Bunga – LRA	481
Tabel 7.5.25	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LRA	482
Tabel 7.5.26	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LRA	482
Tabel 7.5.27	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA	482
Tabel 7.5.28	Pendapatan Denda Pajak Daerah – LRA	483
Tabel 7.5.29	Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LRA	484
Tabel 7.5.30	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa – LRA	485
Tabel 7.5.31	Pendapatan dari Pengembalian	485
Tabel 7.5.32	Pendapatan BLUD – LRA	492
Tabel 7.5.33	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LRA	494
Tabel 7.5.34	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LRA	494
Tabel 7.5.35	Pendapatan Transfer – LRA	495
Tabel 7.5.36	Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	497
Tabel 7.5.37	DBH Sumber Daya Alam(SDA) – LRA	497
Tabel 7.5.38	DBH Lainnya – LRA	498
Tabel 7.5.39	Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	499
Tabel 7.5.40	Dana Alokasi Khusus – LRA	500
Tabel 7.5.41	Dana Alokasi Khusus Fisik – LRA	501
Tabel 7.5.42	DAK Non Fisik – LRA	502
Tabel 7.5.43	Insentif Fiskal – LRA	507
Tabel 7.5.44	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	508
Tabel 7.5.45	Belanja Daerah – LRA	508
Tabel 7.5.46	Belanja Operasi – LRA	509
Tabel 7.5.47	Belanja Pegawai – LRA	510
Tabel 7.5.48	Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN – LRA	511
Tabel 7.5.49	Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN – LRA	512
Tabel 7.5.50	Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN – LRA	514
Tabel 7.5.51	Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD – LRA	514
Tabel 7.5.52	Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH – LRA	516

Tabel 7.5.53 Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH – LRA 517
Tabel 7.5.54 Belanja Pegawai BLUD – LRA 517
Tabel 7.5.55 Realisasi Belanja Pegawai menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA 517
Tabel 7.5.56 Belanja Barang dan Jasa – LRA 519
Tabel 7.5.57 Rincian Belanja Barang – LRA 519
Tabel 7.5.58 Rincian Belanja Jasa – LRA 523
Tabel 7.5.59 Rincian Belanja Pemeliharaan – LRA 528
Tabel 7.5.60 Rincian Belanja Perjalanan Dinas – LRA 531
Tabel 7.5.61 Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LRA 531
Tabel 7.5.62 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS – LRA 532
Tabel 7.5.63 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOSP – LRA 532
Tabel 7.5.64 Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD – LRA 532
Tabel 7.5.65 Realisasi Belanja Barang dan Jasa menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025– LRA 533
Tabel 7.5.66 Realisasi Belanja Barang dan Jasa per masing-masing OPD Tahun 2025– LRA 535
Tabel 7.5.67 Belanja Bunga – LRA 536
Tabel 7.5.68 Belanja Subsidi – LRA 537
Tabel 7.5.69 Realisasi Belanja Subsidi menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA 538
Tabel 7.5.70 Belanja Hibah – LRA 538
Tabel 7.5.71 Belanja Hibah Bantuan Keuangan – LRA 540
Tabel 7.5.72 Realisasi Belanja Hibah menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA 541
Tabel 7.5.73 Realisasi Belanja Hibah per masing-masing OPD Tahun 2025 – LRA 541
Tabel 7.5.74 Belanja Bantuan Sosial – LRA 542
Tabel 7.5.75 Realisasi Belanja Bantuan Sosial menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA 543
Tabel 7.5.76 Belanja Modal – LRA 544
Tabel 7.5.77 Belanja Modal Tanah – LRA 545
Tabel 7.5.78 Realisasi Belanja Modal Tanah menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA 545
Tabel 7.5.79 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin – LRA 545
Tabel 7.5.80 Rincian Belanja Modal Alat Besar – LRA 546
Tabel 7.5.81 Rincian Belanja Modal Alat Modal Angkutan – LRA 546
Tabel 7.5.82 Rincian Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur – LRA 547
Tabel 7.5.83 Rincian Belanja Modal Alat Pertanian – LRA 548
Tabel 7.5.84 Rincian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga – LRA 548
Tabel 7.5.85 Rincian Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar – LRA 549
Tabel 7.5.86 Rincian Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan – LRA 549
Tabel 7.5.87 Rincian Belanja Modal Alat Laboratorium – LRA 550
Tabel 7.5.88 Rincian Belanja Modal Komputer – LRA 551
Tabel 7.5.89 Rincian Belanja Modal Alat Eksplorasi – LRA 551
Tabel 7.5.90 Rincian Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian – LRA .. 551
Tabel 7.5.91 Rincian Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja – LRA 552
Tabel 7.5.92 Rincian Belanja Modal Rambu – rambu – LRA 552
Tabel 7.5.93 Rincian Belanja Modal Peralatan Olahraga – LRA 552
Tabel 7.5.94 Rincian Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOS – LRA 552
Tabel 7.5.95 Rincian Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOSP – LRA 553
Tabel 7.5.96 Rincian Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD – LRA 553
Tabel 7.5.97 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA 554

Tabel 7.5.98	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per masing-masing OPD Tahun 2025 – LRA	555
Tabel 7.5.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – LRA	557
Tabel 7.5.100	Rincian Belanja Modal Bangunan Gedung – LRA	557
Tabel 7.5.101	Rincian Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti – LRA	558
Tabel 7.5.102	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025– LRA	558
Tabel 7.5.103	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per masing-masing OPD Tahun 2025– LRA	559
Tabel 7.5.104	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – LRA	560
Tabel 7.5.105	Rincian Belanja Modal Jalan dan Jembatan – LRA	560
Tabel 7.5.106	Rincian Belanja Modal Bangunan Air – LRA	560
Tabel 7.5.107	Rincian Belanja Modal Instalasi – LRA	560
Tabel 7.5.108	Belanja Modal Jaringan – LRA	561
Tabel 7.5.109	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA	561
Tabel 7.5.110	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per masing-masing OPD Tahun 2025– LRA	562
Tabel 7.5.111	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – LRA	562
Tabel 7.5.112	Rincian Belanja Modal Bahan Perpustakaan – LRA	563
Tabel 7.5.113	Rincian Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga – LRA	563
Tabel 7.5.114	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS – LRA	564
Tabel 7.5.115	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP – LRA	564
Tabel 7.5.116	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA	564
Tabel 7.5.117	Belanja Modal Aset Lainnya	565
Tabel 7.5.118	Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA	566
Tabel 7.5.119	Belanja Transfer – LRA	567
Tabel 7.5.120	Belanja Bagi Hasil – LRA	567
Tabel 7.5.121	Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah – LRA	568
Tabel 7.5.122	Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Batam – LRA	568
Tabel 7.5.123	Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Tanjungpinang – LRA	569
Tabel 7.5.124	Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Bintan – LRA	569
Tabel 7.5.125	Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Karimun – LRA	569
Tabel 7.5.126	Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Natuna – LRA	570
Tabel 7.5.127	Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Lingga – LRA	570
Tabel 7.5.128	Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas – LRA	570
Tabel 7.5.129	Realisasi Belanja Bagi Hasil menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA	571
Tabel 7.5.130	Belanja Bantuan Keuangan – LRA	572
Tabel 7.5.131	Realisasi Belanja Bantuan Keuangan menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA	573
Tabel 7.5.132	Surplus/Defisit Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	573
Tabel 7.5.133	Rincian Saldo Kas Dana Earmark	575
Tabel 7.5.134	Rincian Aset	578
Tabel 7.5.135	Kas Di Kas Daerah	580
Tabel 7.5.136	Kas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	581
Tabel 7.5.137	Kas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Jiwa	581
Tabel 7.5.138	Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 1 Batam	582

Tabel 7.5.139 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 2 Batam 582
Tabel 7.5.140 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 3 Batam 582
Tabel 7.5.141 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 4 Batam 582
Tabel 7.5.142 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 5 Batam 582
Tabel 7.5.143 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 6 Batam 583
Tabel 7.5.144 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 7 Batam 583
Tabel 7.5.145 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 1 Tanjungpinang 583
Tabel 7.5.146 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 2 Tanjungpinang 583
Tabel 7.5.147 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 3 Tanjungpinang 584
Tabel 7.5.148 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 4 Tanjungpinang 584
Tabel 7.5.149 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 1 Bintan Timur 584
Tabel 7.5.150 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 1 Bintan Utara 584
Tabel 7.5.151 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 1 Karimun 584
Tabel 7.5.152 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 2 Karimun 584
Tabel 7.5.153 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri Kundur 585
Tabel 7.5.154 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri Kundur Utara 585
Tabel 7.5.155 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 1 Singkep 585
Tabel 7.5.156 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 1 Bunguran Barat 585
Tabel 7.5.157 Rekapitulasi Kas lainnya Per 31 Desember 2025 587
Tabel 7.5.158 Rekapitulasi Sisa Kas yang tidak termasuk bagian dari Kas Lainnya 591
Tabel 7.5.159 Rekapitulasi Kas di Bendahara BOS SMAN/SMKN/SLBN Per 31 Desember 2025 592
Tabel 7.5.160 Rekapitulasi Saldo Akhir Piutang Pajak Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2025 597
Tabel 7.5.161 Rekapitulasi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud 599
Tabel 7.5.162 Rekapitulasi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib 600
Tabel 7.5.163 Rekapitulasi Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium 601
Tabel 7.5.164 Rekapitulasi Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan 601
Tabel 7.5.165 Rekapitulasi Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 602
Tabel 7.5.166 Rekapitulasi Saldo Akhir Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2025 604
Tabel 7.5.167 Piutang Pendapatan dari Pengembalian 606
Tabel 7.5.168 Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 608
Tabel 7.5.169 Rekapitulasi Piutang Lainnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 608
Tabel 7.5.170 Persentase Penyisihan Piutang Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang 609
Tabel 7.5.171 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2025 609
Tabel 7.5.172 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Retribusi 610
Tabel 7.5.173 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud 611
Tabel 7.5.174 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 611
Tabel 7.5.175 Rekapitulasi Penyisihan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan 612
Tabel 7.5.176 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium 612
Tabel 7.5.177 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan Dinas Perhubungan 613
Tabel 7.5.178 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Denda Pajak Tahun 2025 614

Tabel 7.5.179 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Pemakaian Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 615
Tabel 7.5.180 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan 615
Tabel 7.5.181 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib .. 615
Tabel 7.5.182 Rekapitulasi Beban Dibayar Dimuka OPD per 31 Desember 2025 616
Tabel 7.5.183 Rekapitulasi Persediaan Barang Habis Pakai Dan Hibah Per 31 Desember 2025 617
Tabel 7.5.184 Mutasi Persediaan per OPD 620
Tabel 7.5.185 Rekapitulasi Persediaan Dengan Kondisi Rusak atau Kadaluarsa Per 31 Desember 2025 623
Tabel 7.5.186 Rekapitulasi Dana Bergulir Per 31 Desember 2025 624
Tabel 7.5.187 Rekapitulasi Investasi Jangka Panjang Permanen Per 31 Desember 2025... 624
Tabel 7.5.188 Kapitalisasi atas biaya pemeliharaan..... 627
Tabel 7.5.189 Rekapitulasi Aset Tetap Per 31 Desember 2025 627
Tabel 7.5.190 Mutasi Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2025 628
Tabel 7.5.191 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah per OPD..... 631
Tabel 7.5.192 Rekapitulasi Rincian Aset Tetap Tanah..... 633
Tabel 7.5.193 Bidang Tanah Penarik II 633
Tabel 7.5.194 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025..... 635
Tabel 7.5.195 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per OPD 653
Tabel 7.5.196 Masa Manfaat Aset Tetap Peralatan dan Mesin 655
Tabel 7.5.197 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 657
Tabel 7.5.198 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 660
Tabel 7.5.199 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per OPD..... 675
Tabel 7.5.200 Masa Manfaat Aset Tetap Gedung dan Bangunan..... 677
Tabel 7.5.201 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 677
Tabel 7.5.202 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2025 679
Tabel 7.5.203 Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD..... 686
Tabel 7.5.204 Masa Manfaat Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan 688
Tabel 7.5.205 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 689
Tabel 7.5.206 Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025 692
Tabel 7.5.207 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per OPD 694
Tabel 7.5.208 Masa Manfaat Aset Tetap Lainnya..... 695
Tabel 7.5.209 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025..... 696
Tabel 7.5.210 Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2025... 698
Tabel 7.5.211 Rincian Mutasi Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per OPD..... 700
Tabel 7.5.212 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per OPD..... 702
Tabel 7.5.213 Rincian Daftar Tuntutan Kerugian Daerah 706
Tabel 7.5.214 Rekapitulasi per Jenis Aset Tidak Berwujud 707
Tabel 7.5.215 Mutasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2025..... 707
Tabel 7.5.216 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud per OPD 708
Tabel 7.5.217 Mutasi Aset Lain-lain atas Aset yang akan dihibahkan/rusak berat..... 710
Tabel 7.5.218 Rincian Mutasi Aset Lain-lain – Aset yang akan dihibahkan/rusak berat per OPD..... 716

Tabel 7.5.219	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset yang akan dihibahkan/rusak berat per OPD	718
Tabel 7.5.220	Piutang Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	719
Tabel 7.5.221	Rekapitulasi hasil temuan auditor yang menambah Aset Lainnya - Aset lain-lain	719
Tabel 7.5.222	Mutasi Aset Lainnya - Kas yang Dibatasi Penggunaannya	721
Tabel 7.5.223	Rekapitulasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2025	722
Tabel 7.5.224	Rekapitulasi Aset Properti Investasi Per 31 Desember 2025	727
Tabel 7.5.225	Rekapitulasi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	729
Tabel 7.5.226	Rekapitulasi Pendapatan Diterima Dimuka OPD per 31 Desember 2025	731
Tabel 7.5.227	Rekapitulasi Utang Belanja per 31 Desember 2025	733
Tabel 7.5.228	Mutasi Utang Belanja Per 31 Desember 2025	733
Tabel 7.5.229	Utang Belanja Pegawai	737
Tabel 7.5.230	Utang Belanja Barang dan Jasa	738
Tabel 7.5.231	Utang Belanja Hibah	738
Tabel 7.5.232	Utang Belanja Modal	739
Tabel 7.5.233	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	740
Tabel 7.5.234	Rekapitulasi Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2025	740
Tabel 7.5.235	Rekapitulasi Utang Lebih Bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	741
Tabel 7.5.236	Dana Jaminan Reklamasi dan Dana Jaminan Pascatambang	742
Tabel 7.5.237	Rincian Dana Jaminan Reklamasi dan Dana Jaminan Pascatambang	742
Tabel 7.5.238	Dana Jaminan Reklamasi & Pascatambang Atas Nama Gubernur/Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	744
Tabel 7.5.239	Pendapatan–LO	753
Tabel 7.5.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	754
Tabel 7.5.241	Rincian Selisih Pendapatan Asli Daerah (PAD) LRA dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) LO	755
Tabel 7.5.242	Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah-LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO	757
Tabel 7.5.243	Penjelasan Selisih Retribusi Daerah-LRA dengan Retribusi Daerah-LO	759
Tabel 7.5.244	Rincian Selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	762
Tabel 7.5.245	Penjelasan Selisih Lain-lain PAD Yang Sah-LRA dengan Lain-lain PAD Yang Sah-LO	763
Tabel 7.5.246	Pendapatan Transfer – LO	769
Tabel 7.5.247	Rincian Selisih Pendapatan Transfer-LRA dengan Pendapatan Transfer-LO	771
Tabel 7.5.248	Penjelasan Selisih Pendapatan Transfer-LRA dengan Pendapatan Transfer-LO	771
Tabel 7.5.249	Pendapatan Hibah – LO	773
Tabel 7.5.250	Rincian Selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	773
Tabel 7.5.251	Penjelasan selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	775
Tabel 7.5.252	Daftar Barang SMK Negeri 6 Batam yang bersumber dari CSR	777
Tabel 7.5.253	Daftar Barang yang bersumber dari Bantuan Sarana Digitalisasi	777
Tabel 7.5.254	Beban Operasi – LO	780
Tabel 7.5.255	Rincian Beban Pegawai	781
Tabel 7.5.256	Beban Pegawai per SKPD Tahun 2025	782
Tabel 7.5.257	Rincian Selisih Perbedaan Belanja Pegawai-LRA dan Beban Pegawai-LO	784

Tabel 7.5.258 Penjelasan Selisih Perbedaan Belanja Pegawai-LRA dan Beban Pegawai-LO 786
Tabel 7.5.259 Rincian Beban Barang dan Jasa– LO 790
Tabel 7.5.260 Rincian Beban Barang – LO 790
Tabel 7.5.261 Beban Barang per SKPD Tahun 2025 790
Tabel 7.5.262 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Barang-LRA dan Beban Barang-LO 792
Tabel 7.5.263 Penjelasan Selisih Perbedaan Belanja Barang-LRA dan Beban Barang-LO ... 793
Tabel 7.5.264 Rincian Beban Jasa – LO 794
Tabel 7.5.265 Beban Jasa per SKPD Tahun 2025 794
Tabel 7.5.266 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Jasa-LRA dan Beban Jasa-LO 796
Tabel 7.5.267 Penjelasan Selisih Perbedaan Belanja Jasa-LRA dan Beban Jasa-LO 797
Tabel 7.5.268 Rincian Beban Pemeliharaan – LO 798
Tabel 7.5.269 Beban Pemeliharaan per SKPD Tahun 2025 798
Tabel 7.5.270 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Pemeliharaan -LRA dan Beban Pemeliharaan-LO 800
Tabel 7.5.271 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Pemeliharaan -LRA dan Beban Pemeliharaan-LO 801
Tabel 7.5.272 Rincian Beban Perjalanan Dinas – LO 804
Tabel 7.5.273 Beban Perjalanan Dinas per SKPD Tahun 2025 804
Tabel 7.5.274 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Perjalanan Dinas -LRA dan Beban Perjalanan Dinas -LO 806
Tabel 7.5.275 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Perjalanan Dinas-LRA dan Beban Perjalanan Dinas-LO 806
Tabel 7.5.276 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 808
Tabel 7.5.277 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per SKPD 808
Tabel 7.5.278 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat -LRA dan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat -LO 809
Tabel 7.5.279 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat -LRA dan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat -LO 810
Tabel 7.5.280 Rincian Beban Barang dan Jasa BOS – LO 810
Tabel 7.5.281 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Barang dan Jasa BOSP-LRA dan Beban Barang dan Jasa BOSP-LO 811
Tabel 7.5.282 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Barang dan Jasa BOSP-LRA dan Beban Barang dan Jasa BOSP-LO 812
Tabel 7.5.283 Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD 814
Tabel 7.5.284 Beban Barang dan Jasa BLUD per SKPD 814
Tabel 7.5.285 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Barang dan Jasa BLUD-LRA dan Beban Barang dan Jasa BLUD-LO 814
Tabel 7.5.286 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Barang dan Jasa BLUD -LRA dan Beban Barang dan Jasa BLUD-LO 816
Tabel 7.5.287 Beban Bunga Tahun 2025 818
Tabel 7.5.288 Rincian Beban Subsidi 818
Tabel 7.5.289 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Subsidi-LRA dan Beban Subsidi-LO 818
Tabel 7.5.290 Beban Subsidi per SKPD Tahun 2025 818
Tabel 7.5.291 Rincian Beban Hibah – LO 819
Tabel 7.5.292 Beban Hibah per SKPD Tahun 2025 819

Tabel 7.5.293	Rincian Selisih Perbedaan Belanja Hibah-LRA dan Beban Hibah-LO	820
Tabel 7.5.294	Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Hibah-LRA dan Beban Hibah-LO	822
Tabel 7.5.295	Uraian Beban Bantuan Sosial – LO	825
Tabel 7.5.296	Beban Bantuan Sosial per SKPD Tahun 2025	825
Tabel 7.5.297	Rincian Selisih Perbedaan Belanja Bantuan Sosial-LRA dan Beban Bantuan Sosial-LO	825
Tabel 7.5.298	Beban Penyisihan Piutang per SKPD	826
Tabel 7.5.299	Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD tahun 2025.....	826
Tabel 7.5.300	Beban Bagi Hasil – LO	828
Tabel 7.5.301	Rincian Selisih Perbedaan Belanja Bagi Hasil-LRA dan Beban Bagi Hasil-LO	829
Tabel 7.5.302	Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Bagi Hasil -LRA dan Beban Bagi Hasil -LO.....	829
Tabel 7.5.303	Beban Bantuan Keuangan – LO	830
Tabel 7.5.304	Selisih Perbedaan Belanja Bantuan Keuangan - LRA dan Beban Bantuan Keuangan – LO.....	831
Tabel 7.5.305	Beban Luar Biasa Tahun 2025	832
Tabel 7.5.306	Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Operasi.....	833
Tabel 7.5.307	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	834
Tabel 7.5.308	Arus Masuk Kas dari aktivitas investasi.....	835
Tabel 7.5.309	Arus Keluar Kas dari aktivitas investasi	835
Tabel 7.5.310	Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Pendanaan	836
Tabel 7.5.311	Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Pendanaan.....	837
Tabel 7.5.312	Arus Masuk Kas dari aktivitas Transitoris.....	837
Tabel 7.5.313	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris.....	838
Tabel 7.5.314	Rincian Koreksi Nilai Persediaan	840
Tabel 7.5.315	Rincian Koreksi Kas di BLUD	841
Tabel 7.5.316	Rincian Koreksi Piutang Pajak Daerah	841
Tabel 7.5.317	Rincian Koreksi Piutang Lain-lain PAD yang Sah.....	842
Tabel 7.5.318	Rincian Koreksi Penyisihan Piutang.....	842
Tabel 7.5.319	Rincian Koreksi Penyertaan Modal.....	843
Tabel 7.5.320	Rincian Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....	844
Tabel 7.5.321	Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Rusak Berat/Lainnya.....	845
Tabel 7.5.322	Rincian Koreksi Utang Belanja.....	846
Tabel 7.5.323	Rincian Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya.....	846

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 7.2.1	Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Triwulanan)	17
Grafik 7.2.2	Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahunan)	17
Grafik 7.2.3	Struktur Ekonomi Sisi Pengeluaran	19
Grafik 7.2.4	Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	19
Grafik 7.2.5	Konsumsi Listrik Rumah Tangga	20
Grafik 7.2.6	Realisasi Belanja APBD	20
Grafik 7.2.7	Perkembangan Realisasi APBD Wilayah Kepri	21
Grafik 7.2.8	Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	21
Grafik 7.2.9	Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)	22
Grafik 7.2.10	Perkembangan Ekspor Total Luar Negeri	22
Grafik 7.2.11	Perkembangan Ekspor Komoditas Nonmigas dan Migas	23
Grafik 7.2.12	Perkembangan Ekspor Produk Elektronik, Produk Mesin dan Produk Kapal	23
Grafik 7.2.13	Indeks of Industrial Production (IIP) Singapura untuk Computer, Elektronik & Optical Products	24
Grafik 7.2.14	Perkembangan Impor	24
Grafik 7.2.15	Perkembangan Impor Nonmigas - BECA	25
Grafik 7.2.16	Konstribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (%)	25
Grafik 7.2.17	Konsumsi Listrik Industri	26
Grafik 7.2.18	Perkembangan Impor Bahan Baku	27
Grafik 7.2.19	Perkembangan Pengadaan/Penjualan Semen	27
Grafik 7.2.20	Kredit Sektor Perdagangan	28
Grafik 7.2.21	SBT Perdagangan	28
Grafik 7.2.22	Perkembangan Ekspor Migas	29
Grafik 7.2.23	Komposisi Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2025	30
Grafik 7.2.24	Perkembangan Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2025	31
Grafik 7.2.25	Realisasi Pendapatan pada masing-masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri	32
Grafik 7.2.26	Komposisi Realisasi Belanja Triwulan IV 2025	34
Grafik 7.2.27	Perkembangan Realisasi Belanja Triwulan IV 2025	34
Grafik 7.2.28	Realisasi Belanja pada masing-masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri	35
Grafik 7.2.29	Inflasi Triwulan IV 2025 Regional Sumatera (yoy)	42
Grafik 7.2.30	Perkembangan Inflasi Kepulauan Riau, Nasional dan Sumatera Triwulan IV 2025 (% yoy)	43
Grafik 7.2.31	Perkembangan Inflasi Tahunan Kepulauan Riau, Batam, Tanjungpinang dan Karimun (% yoy)	44
Grafik 7.2.32	Perkembangan Aset Perbankan	52
Grafik 7.2.33	Pertumbuhan Aset Berdasarkan Kelompok Bank	52
Grafik 7.2.34	Perkembangan DPK Perbankan	53
Grafik 7.2.35	DPK Perbankan Berdasarkan Jenis Simpanan	53
Grafik 7.2.36	Perkembangan Kredit Perbankan	54
Grafik 7.2.37	Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	54
Grafik 7.2.38	Porsi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	55
Grafik 7.2.39	Perkembangan Suku Bunga Kredit	55
Grafik 7.2.40	Kredit Sektor Industri Pengolahan	56
Grafik 7.2.41	Kredit Konstruksi	56
Grafik 7.2.42	Intermediasi dan Risiko Perbankan Kepri	57
Grafik 7.2.43	Perkembangan Kredit Korporasi	58

Grafik 7.2.44	Pangsa Kredit Korporasi (5 LU Terbesar)	58
Grafik 7.2.45	Survei Ekspetasi Konsumen	59
Grafik 7.2.46	Survei Indeks Penghasilan Konsumen	59
Grafik 7.2.47	Kredit Rumah Tangga	60
Grafik 7.2.48	Kredit Konsumsi	60
Grafik 7.2.49	DPK Perseorangan	61
Grafik 7.2.50	Pangsa DPK Perseorangan	61
Grafik 7.2.51	Perkembangan Kredit UMKM	63
Grafik 7.2.52	Perkembangan Inflow dan Outflow Kepri	65
Grafik 7.2.53	Perkembangan Pertumbuhan Inflow dan Outflow	65
Grafik 7.2.54	Perkembangan Pemusnahan UTLE	66
Grafik 7.2.55	Perkembangan Temuan Uang Palsu	67
Grafik 7.2.56	Perkembangan RTGS di Provinsi Kepri	67
Grafik 7.2.57	Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Kepri	68
Grafik 7.2.58	Perkembangan Transaksi Kartu Debit	69
Grafik 7.2.59	Perkembangan Transaksi Kartu Kredit	69
Grafik 7.2.60	Perkembangan Transaksi UE di Provinsi Kepri	70
Grafik 7.2.61	Perkembangan Merchant QRIS berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepri triwulan IV 2025	70
Grafik 7.2.62	Perkembangan Merchant QRIS berdasarkan Kelompok Usaha triwulan IV 2025	71
Grafik 7.2.63	Perkembangan Volume Tranksaksi QRIS di Provinsi Kepri	71
Grafik 7.2.64	Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS di Provinsi Kepri	72
Grafik 7.2.65	Penyaluran Program Keluarga Penerima Manfaat Triwulan IV 2025 di Wilayah Provinsi Kepri	74
Grafik 7.2.66	Penyaluran Program Keluarga Harapan Triwulan IV 2025 di Wilayah Provinsi Kepri	74
Grafik 7.2.67	Penyaluran Program Sembako Triwulan IV 2025 di Wilayah Provinsi Kepri.	75
Grafik 7.2.68	Perkembangan Transaksi KUPVA	76
Grafik 7.2.69	Pergerakan Transaksi KUPVA & Nilai Tukar Rupiah	76
Grafik 7.2.70	Perkembangan Transaksi pada PJP LR	77
Grafik 7.2.71	Jumlah Pengaduan Perlindungan Konsumen sepanjang Tahun 2025	78
Grafik 7.2.72	Perkembangan NTP	81
Grafik 7.2.73	NTP Berdasarkan Subsektor	81
Grafik 7.2.74	Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepri	83
Grafik 7.2.75	Gini Ratio Provinsi di Wilayah Sumatera	83
Grafik 7.2.76	Perkembangan IPM Kepri	84
Grafik 7.2.77	Pertumbuhan Ekonomi Negara Mitra Dagang (%, yoy)	86
Grafik 7.2.78	Perkembangan Inflasi Negara Mitra Dagang (%,yoy)	86
Grafik 7.2.79	Likert Scale Perkiraan Penjualan Domestik	87
Grafik 7.2.80	Likert Scale Perkiraan Investasi	87
Grafik 7.3.1	PDRB Lapangan Usaha Kepulauan Riau C-to-C TW IV-2025	125
Grafik 7.3.2	PDRB Pengeluaran Kepulauan Riau C-to-C TW IV-2025	126
Grafik 7.3.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi C-to-C, 2018-2025 (%)	127
Grafik 7.3.4	Perbandingan Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Target Akhir RPJMD	128
Grafik 7.3.5	Tren Perkembangan Penurunan Rasio Gini	138
Grafik 7.3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Gini Tahun 2025	139
Grafik 7.3.7	Tren Perkembangan Peningkatan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau	147
Grafik 7.3.8	Perbandingan Realisasi PDRB-Perkapita dengan Target Akhir RPJMD	147
Grafik 7.3.9	Tren Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi	156

Grafik 7.3.10	Perbandingan Realisasi RB Tahun 2025 dengan Target RPJMD	157
Grafik 7.3.11	Perkembangan Capaian Indeks SPBE Provinsi Kepulauan Riau	158
Grafik 7.3.12	Trend Nilai IKM Pemprov Kepri 2018-2025	171
Grafik 7.3.13	Distribusi Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut tingkat Pendidikan Tahun 2023-2025	178
Grafik 7.3.14	Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015-2025	179
Grafik 7.3.15	Data Capaian ILKH Provinsi Kepulauan Riau 2021 – 2025	186
Grafik 7.3.16	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	188
Grafik 7.3.17	Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kepulauan Riau (tahun), 2020–2025	198
Grafik 7.3.18	Pencapaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	199
Grafik 7.3.19	Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS)	199
Grafik 7.3.20	Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS)	200
Grafik 7.3.21	Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan	200
Grafik 7.3.22	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau,2020–2025	202
Grafik 7.3.23	Realisasi IPM dengan target Akhir RPJMD	203
Grafik 7.3.24	Indikator Provinsi Kepulauan Riau dan IPM Nasional Tahun 2021- 2025	204
Grafik 7.3.25	Tren Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	214
Grafik 7.3.26	Perbandingan Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	215
Grafik 7.3.27	APS Provinsi Diantara Wilayah Provinsi Se Sumatera Tahun 2025	215
Grafik 7.3.28	Jumlah Pembangunan RKB Prov Kepri 2021-2025	218
Grafik 7.3.29	Jumlah Siswa Penerima SPP Gratis 2024-2025	220
Grafik 7.3.30	Tren Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 – 2025	225
Grafik 7.3.31	Tren Penurunan Tingkat Kemiskinan 2020-2025	235
Grafik 7.3.32	Perbandingan Realisasi Tingkat Kemiskinan dengan Target RPJMD	236
Grafik 7.3.33	Prevalensi Stunting Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau	240
Grafik 7.3.34	Target dan Realisasi Prevalensi Stunting Tahun 2020-2025	241
Grafik 7.3.35	Perbandingan Realisasi dan Target Akhir RPJMD	241
Grafik 7.3.36	Perbandingan Prevalensi Stunting Nasional	242
Grafik 7.3.37	Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil	244
Grafik 7.3.38	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita	245
Grafik 7.3.39	Tren Rasio Konektivitas Provinsi Kepulauan Riau	254
Grafik 7.3.40	Perbandingan Capaian Rasio Konektivitas Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD	255
Grafik 7.3.41	Tren Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan Prov Kepri 2022-2025	261
Grafik 7.3.42	Perbandingan Realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan	262
Grafik 7.3.43	Persentase Penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan, terhadap masyarakat 15 tahun ke atas	263
Grafik 7.3.44	Tren Perkembangan Rasio Elektrifikasi	276
Grafik 7.3.45	Perbandingan Realisasi Rasio Elektrifikasi dengan	277
Grafik 7.3.46	Tren Peningkatan Persentase Jalan Kondisi Mantap	281
Grafik 7.3.47	Perbandingan Persentase Jalan Kondisi Mantap Target Nasional & Provinsi	282
Grafik 7.3.48	Perbandingan Capaian Indeks Infrastruktur dengan Target Akhir RPJMD	288
Grafik 7.3.49	Perbandingan Indeks Modal Manusia dengan Target Akhir RPJMD	296
Grafik 7.3.50	Perbandingan Capaian IMM Provinsi Kepri dengan Nasional	297
Grafik 7.3.51	Tren Peningkatan Indeks Ekonomi Hijau Daerah	309
Grafik 7.3.52	Tren Peningkatan Indeks Ekonomi Hijau Daerah	310

Grafik 7.3.53 Perbandingan Realisasi Indeks Ekonomi Hijau Daerah Nasional & Provinsi..... 311

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 7.3.1	IPM Menurut Kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan Status Pembangunan Manusia, 2025	201
Gambar 7.3.2	Indikator Provinsi Kepulauan Riau dan IPM Nasional Tahun 2025	204
Gambar 7.3.3	Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahun 2025	219
Gambar 7.3.4	Penyerahan Seragam Sekolah Gratis	220
Gambar 7.3.5	Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	222
Gambar 7.3.6	Alternatif solusi untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	222
Gambar 7.3.7	Pekerjaan Jalan di Provinsi Kepri Tahun 2025	284
Gambar 7.3.8	Pembangunan dan Pemeliharaan Pelabuhan Provinsi Kepri Tahun 2025	290
Gambar 7.3.9	Pemasangan Bantuan Penyambungan Listrik	291

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rekapitulasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lampiran 2	Rekapitulasi Penerima Hibah
Lampiran 3	Rekapitulasi Beban Sewa Dibayar Dimuka
Lampiran 4	Daftar Persediaan yang sudah Rusak / Kadaluarsa
Lampiran 5	Daftar Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Lampiran 6	Daftar Kendaraan Bermotor yang tercatat di KIB dan telah dilengkapi BPKB
Lampiran 7	Rincian Amortisasi per Jenis Aset Tidak Berwujud
Lampiran 8	Rekapitulasi Pendapatan Diterima Dimuka
Lampiran 9	Daftar Kewajiban Jangka Pendek atas Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gubernur Kepulauan Riau,

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Ansar Ahmad

LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	RIFF CALK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2024
1	PENDAPATAN DAERAH-LRA					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	7.5.1.1.1.				
3	Pajak Daerah - LRA	7.5.1.1.1.1	1 917 230 624 210,00	1 447 285 068 165,50	89,48	1.777 704 385 140,00
4	Retribusi Daerah - LRA	7.5.1.1.1.2	166 940 50' 788,24	171 6' 7.387.082,00	10' ,53	148 286 242 047,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA	7.5.1.1.1.3	3.100.000 000,00	2 279 539 541,20	73,46	1.804.909.395,00
6	Lain-lain PAD yang Sah - LRA	7.5.1.1.1.4	115.484.556.086.' 8	115.253.171.423,10	99,80	91 599 329.972,36
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LRA (3 s.d 6)		5.504.763.732.480,43	1.736.336.133.204,80	31,54	1.999.491.793.464,68
8	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	7.5.1.1.2.				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	7.5.1.1.2.1	2 094 127 111 992,00	1.974 289.383.024,00	98,61	1.978.535.388.207,00
10	Jumlah Pendapatan Transfer - LRA (8)		2.094.127.111.992,00	1.974.289.383.024,00	98,61	1.978.535.388.207,00
11	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	7.5.1.1.3.				
12	Pendapatan Hibah - LRA		1 324 102 500,00	1 798 843 934,67	135,86	1.300.591.591,00
13	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA (12)		1.324.102.500,00	1.798.843.934,67	135,86	1.300.591.591,00
14	JUMLAH PENDAPATAN - LRA (7+10+13)		3.818.216.886.482,43	3.712.424.360.963,46	94,94	3.956.296.561.262,68
15	BELANJA DAERAH					
16	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.1.				
17	Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.1	1.468.782.553.025,50	1.448 697.843 513,04	94,65	1 308.630 668.704,00
18	Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.2.1.2	1 304 383.524 488,42	1 161 031 240 158,32	89,74	1 311.138 772 714,18
19	Belanja Bunga	7.5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	3.852 560 273,00
20	Belanja Subsidi	7.5.1.2.1.4	2.804.484.081,38	834 852 981,00	29,14	944 301 180,00
21	Belanja Hibah	7.5.1.2.1.5	174.868.635.278,01	365 767 273 007,00	94,80	327 581 329 208,27
22	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.6	2.856.445.000,00	1 634 840 000,01	64,24	4 002 025 000,00
23	Jumlah Belanja Operasi (17 s.d 22)		2.944.460.161.989,31	2 779 285.968.671,36	94,48	2.987.162.788.089,45
24	BELANJA MODAL	7.5.1.2.2.				
25	Belanja Modal Tanah	7.5.1.2.2.1	1.000.000.000,00	992.100.000,00	99,21	920 100 000,00
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.2.2	83.795.850.121,33	81 499.424.613,00	97,82	115 936 165.838,84
27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.2.3	84 402 416 281,00	80 739 661 394,00	95,51	129.103.981.833,56
28	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.2.4	61 986 061 381,00	46 349.371.983,10	74,71	96.791.782.576,47
29	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.2.5	21 970 627 662,00	21.957.775.186,00	99,94	19 630 419.447,20
30	Belanja Modal Aset Lainnya	7.5.1.2.2.6	1.125.759.000,00	500.244.300,00	50,02	3.369.671.584,00
31	Jumlah Belanja Modal (24 s.d 30)		268.313.811.478,33	232.139.577.790,10	86,26	367.344.073.886,88
32	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.5.1.2.3.				
33	Belanja Tidak Terduga		2 281 996 909,00	0,00	0,00	2.369 423 140,00
34	Jumlah Belanja Tak Terduga (33)		2.281.356.863,00	0,00	0,00	2.369.423.140,00
35	BELANJA TRANSFER	7.5.1.2.4.				
36	Belanja Bagi Hasil	7.5.1.2.4.1	836 706 050 533,00	680 961 951 944,00	98,89	748.291.201 019,00
37	Belanja Bantuan Keuangan	7.5.1.2.4.2	18 110.000.000,00	13.236.478.700,00	73,09	29.551 000 000,00
38	Jumlah Belanja Transfer (36 s.d 37)		715.816.050.533,00	704.198.430.644,00	98,38	778.144.201.019,00
39	JUMLAH BELANJA (23+31+34+38)		3.932.601.196.000,66	3.715.984.258.929,84	94,49	4.071.747.487.835,21
40	SURPLUS/DEFISIT (14-39)	7.5.1.3.	(22.286.164.436,01)	(3 169 956.762,04)	14,22	(115.452.096.662,01)
41	PEMBIAYAAN DAERAH	7.5.1.4.				
42	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.4.1				
43	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		27.286.164.436,01	27 291 478 128,01	99,72	232 689 164 925,62
44	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Jangka		0,00	82 000 000,00	0,00	160 683 706,00
45	Jumlah Penerimaan Pembiayan (43 s.d 44)		27.286.164.436,01	27 291.478.128,01	100,01	232.884.048.631,62
46	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.1.4.2				
47	Penyertaan Modal Daerah		5.000.000.000,00	5 000 000 000,00	100,00	0,00
48	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	0,00	0,00	91.945.787.633,00
49	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (47 s.d 48)		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	91.945.787.633,00
50	PEMBIAYAAN NETTO (45-49)		22.286.164.436,01	22.291.478.128,01	100,03	140.938.260.998,62

NO	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2024
51	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (49+50)	7.5.1.5.	0,00	19.121.577.366,93	0,00	27.286.164.438,01

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Gubernur Kepulauan Riau,

Ansar Ahmad

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	REFF CALK	TAHUN 2025 (AUDITED)	TAHUN 2024
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2.1.	27.288.164.438,01	231.214.715.013,24
2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	7.5.2.2.	27.208.640.128,01	232.583.164.925,62
3	**Subtotal (1-2)**		**77.524.310,00**	**(1.368.449.912,38)**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembayaran Anggaran (SILPA/SIKPA)	7.5.2.3.	19.121.577.365,93	27.288.164.438,01
5	**Subtotal (3+4)**		**19.199.101.675,93**	**25.919.714.525,63**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		(77.524.310,00)	1.368.449.912,38
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)**		**19.121.577.365,93**	**27.288.164.438,01**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Gubernur Kepulauan Riau,

Ansar Ahmad

3. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025 (AUDITED)	TAHUN 2024
1	ASET	7.5.3.1.		
2	ASET LANCAR	7.5.3.1.1.		
3	Kas di Kas Daerah	7.5.3.1.1.1	14.358.745.416,80	23.302.940.904,77
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1.1.2	311.609.541,00	19.04' 005,00
5	Kas di BLUD	7.5.3.1.1.3	2.499.584.865,03	2.264.885.131,34
6	Kas Lainnya	7.5.3.1.1.4	201.711.431,00	524.202.676,64
7	Kas Dana BOSP	7.5.3.1.1.5	1.868.989.519,00	1.899.080.482,84
8	Piutang Pajak Daerah	7.5.3.1.1.6	15.748.913.169,68	99.618.122.631,00
9	Piutang Retribusi Daerah	7.5.3.1.1.7	4.490.691.222,00	11.437.716.976,00
10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.5.3.1.1.8	4.348.296.036,03	18.180.173.021,32
11	Piutang Lainnya	7.5.3.1.1.9	98.250.000,00	98.250.000,00
12	Penyisihan Piutang	7.5.3.1.1.10	(19.70'.173.291,11)	(55.851.818.877,95)
13	Beban Dibayar Dimuka	7.5.3.1.1.11	1.904.982.256,93	1.809.600.083,37
14	Persediaan	7.5.3.1.1.12	116.695.901.122,37	294.022.966.235,40
15	Jumlah Aset Lancar (3 s.d 14)		143.020.592.080,83	386.123.239.870,43
16	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.3.1.2.		
17	INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN	7.5.3.1.2.1		
18	Investasi Non Permanen		0,00	0,00
19	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen (18)		0,00	0,00
20	INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN	7.5.3.1.2.2		
21	Investasi Permanen		135.977.916.508,00	136.205.300.338,00
22	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen (21)		135.977.916.508,00	136.205.300.338,00
23	Jumlah Investasi Jangka Panjang (19+22)		135.977.916.508,00	136.205.300.338,00
24	ASET TETAP	7.5.3.1.3.		
25	Tanah	7.5.3.1.3.1	1.187.618.664.254,11	1.275.193.541.736,32
26	Peralatan dan Mesin	7.5.3.1.3.2	2.203.822.502.849,21	2.115.169.411.486,30
27	Gedung dan Bangunan	7.5.3.1.3.3	2.897.252.506.161,96	2.878.738.414.770,81
28	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.3.1.3.4	4.132.540.'34.981,23	4.011.564.533.136,15
29	Aset Tetap Lainnya	7.5.3.1.3.5	301.651.006.245,70	279.218.737.302,70
30	Konstruksi dalam Pengerjaan	7.5.3.1.3.6	29.005.424.959,95	25.295.805.684,94
31	Akumulasi Penyusutan	7.5.2.1.3.7	(4.943.566.093.920,48)	(4.349.810.470.728,71)
32	Jumlah Aset Tetap (26 s.d 31)		6.888.366.749.828,72	6.033.363.976.380,81
33	ASET LAINNYA	7.5.3.1.4.		
34	Tagihan Jangka Panjang		992.008.950,00	993.008.950,00
35	Aset Tidak Berwujud		28.469.284.427,08	26.348.603.927,06
36	Aset Lain-lain		356.329.356.721,02	381.847.876.562,91
37	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(2.413.781.320,00)	(2.413.781.320,00)
38	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(44.326.614.613,55)	(41.286.530.986,55)
39	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		188.211.642.151,48	196.352.186.247,62
40	Jumlah Aset Lainnya (34 s.d 39)		535.191.878.315,99	541.842.363.399,04
41	PROPERTI INVESTASI	7.5.3.1.5.		
42	Properti Investasi Tanah		102.645.507.704,21	0,00
43	Jumlah Properti Investasi (42)		102.646.507.704,21	0,00
44	JUMLAH ASET (16+23+32+40+43)		6.816.191.662.141,76	7.106.534.873.977,98
45	KEWAJIBAN	7.5.3.2.		
46	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.3.2.1.		
47	Utang Pemungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.3.2.1.1	144.172.310,00	14.391.867,00
48	Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.3.2.1.2	1,270.103.058,34	0,00
49	Utang Belanja	7.5.3.2.1.3	205.173.955.504,00	451.420.582.417,31
50	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.3.2.1.4	4.435.073.655,37	3,466.450.196,50
51	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (47 s.d 50)		211.017.204.627,71	454.901.424.480,81
52	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.5.3.2.2.		

NO.	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025 (AUDITED)	TAHUN 2024
53	Utang Kepada Pemerintah Pusat	7.5.3.2.2.1	198.211.642.151,46	198.353.186.257,62
54	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (53)**		**198.211.642.151,46**	**198.353.186.257,62**
55	**JUMLAH KEWAJIBAN (51+54)**		**409.239.848.679,17**	**861.250.816.738,43**
56	**EKUITAS**	7.6.3.3.		
57	Ekuitas		6,406,952,705,482,58	6,454,280,263,239,55
58	**JUMLAH EKUITAS (57)**		**6,406,952,705,482,58**	**6,454,280,263,239,55**
59	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (55+58)**		**6,816,191,552,161,75**	**7,106,634,873,977,98**

Gubernur Kepulauan Riau.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Ansar Ahmad

4. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025 (AUDITED)	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN - LO	7.5.4.1.				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	7.5.4.1.1.				
4	Pajak Daerah-LO		1.362.866.776.941,50	1.787.142.204.747,00	(424.255.427.805,50)	(23,74)
5	Retribusi Daerah-LO		163.297.061.611,33	155.726.470.273,30	7.570.591.238,03	4,86
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO		2.275.535.041,00	1.904.809.335,00	370.627.206,00	19,46
7	Lain-lain PAD yang Sah-LO		87.344.326.889,86	48.872.833.967,50	47.471.394.902,35	95,18
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO (4 s.d 7)		1.625.803.795.893,69	1.994.646.819.322,80	(368.842.814.458,12)	(18,49)
9	PENDAPATAN TRANSFER-LO	7.5.4.1.2.				
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO		1.971.180.493.024,00	1.949.864.986.207,00	21.305.506.817,00	1,10
11	Jumlah Pendapatan Transfer-LO (10)		1.971.180.493.024,00	1.949.864.986.207,00	21.305.506.817,00	1,10
12	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	7.5.4.1.3.				
13	Pendapatan Hibah - LO		224.057.428.396,23	170.967.444.887,66	53.089.978.507,57	31,05
14	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO (13)		224.057.428.396,23	170.967.444.887,66	53.089.978.507,57	31,05
15	JUMLAH PENDAPATAN-LO (5+11+14)		3.821.041.620.282,91	4.115.268.948.417,46	(294.247.328.134,55)	(7,15)
16	BEBAN	7.5.4.2.				
17	BEBAN OPERASI	7.5.4.2.1.				
18	Beban Pegawai	7.5.4.2.1.1	1.450.879.240.714,54	1.309.490.093.784,00	141.389.146.930,54	10,80
19	Beban Barang dan Jasa	7.5.4.2.1.2	1.321.670.857.788,70	1.468.829.936.561,96	(146.159.078.772,26)	(9,95)
20	Beban Bunga	7.5.4.2.1.3	0,00	3.076.851.404,00	(3.076.851.404,00)	(100,00)
21	Beban Subsidi	7.5.4.2.1.4	934.852.901,00	944.301.160,00	(109.448.169,00)	(11,58)
22	Beban Hibah	7.5.4.2.1.5	182.120.444.855,37	353.850.454.704,03	(171.730.010.048,66)	(48,53)
23	Beban Bantuan Sosial	7.5.4.2.1.6	1.634.940.000,00	4.002.925.000,00	(2.167.985.000,00)	(54,16)
24	Beban Penyelahan Potong	7.5.4.2.1.7	1.150.870.424,67	24.667.815.407,50	(23.516.944.982,83)	(95,33)
25	Jumlah Beban Operasi (18 s.d 24)		2.958.491.006.575,28	3.162.864.178.041,49	(204.373.171.466,21)	(6,46)
26	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	7.5.4.2.2.				
27	Beban Penyusutan dan Amortisasi		378.279.697.533,32	391.610.349.705,48	(13.330.652.172,16)	(3,40)
28	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi (27)		378.279.697.533,32	391.610.349.705,48	(13.330.652.172,16)	(3,40)
29	BEBAN TRANSFER	7.5.4.2.3.				
30	Beban Bagi Hasil	7.5.4.2.3.1	525.174.135.186,00	796.635.218.678,00	(271.461.083.692,00)	(34,08)
31	Beban Bantuan Keuangan	7.5.4.2.3.2	13.236.478.700,00	26.853.000.000,00	(13.616.521.300,00)	(50,71)
32	Jumlah Beban Transfer (30 s.d 31)		538.410.613.886,00	823.488.218.678,00	(285.077.604.992,00)	(34,62)
33	JUMLAH BEBAN (25+28+32)		3.875.181.317.994,60	4.377.962.748.424,97	(502.781.228.630,37)	(11,48)
34	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (16-33)		(54.139.697.711,69)	(262.693.797.207,51)	208.553.999.495,82	(79,38)
35	KEGIATAN NON OPERASIONAL					
36	SURPLUS NON OPERASIONAL					
37	Jumlah Surplus Non Operasional-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
38	DEFISIT NON OPERASIONAL					
39	Defisit Penjualan/Penyelesaian/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		18.276.061.807,00	39.000.172.538,59	(20.725.110.731,59)	(53,14)
40	Jumlah Defisit Non Operasional-LO (39)		18.276.061.807,00	39.000.172.538,59	(20.725.110.731,59)	(53,14)
41	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL (37 - 40)	7.5.4.2.4.	(18.276.061.807,00)	(39.000.172.538,59)	20.725.110.731,59	(53,14)
42	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA-LO (16-33+41)		(72.434.959.518,69)	(301.693.969.746,40)	229.259.010.227,71	(75,99)
43	POS LUAR BIASA					

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025 (AUDITED)	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
44	PENDAPATAN LUAR BIASA-LO					
45	Jumlah Pendapatan Luar Biasa - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
46	BEBAN LUAR BIASA					
47	Beban Luar Biasa	7.5.4.2.5.	0,00	2.065.423.140,00	(2.065.423.140,00)	(100,00)
48	Jumlah Beban Luar Biasa (47)		0,00	2.065.423.140,00	(2.065.423.140,00)	(100,00)
49	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA (45-48)	7.5.4.2.6.	0,00	(2.065.423.140,00)	2.065.423.140,00	(100,00)
50	SURPLUS/DEFISIT-LO (42+49)	7.5.4.3.	(72.434.889.515,99)	(305.759.162.856,40)	231.324.433.307,71	(75,65)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Gubernur Kepulauan Riau,

Ansar Ahmad

5. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025 (AUDITED)	TAHUN 2024
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.5.5.1.		
2	Arus Masuk Kas	7.5.5.1.1.		
3	Penerimaan Pajak Daerah		1.447.295.058.158,50	1.777.704.385.140,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		7.171.691.939,00	10.634.818.641,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2.275.538.541,00	1.904.909.335,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		108.396.440.289,82	30.108.755.601,70
7	Penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.632.475.376.327,00	1.782.713.485.766,00
8	Penerimaan Hibah		1.798.843.934,57	1.300.531.561,00
9	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 8)		3.200.402.888.189,89	3.804.366.998.276,70
10	Arus Keluar Kas	7.5.5.1.2.		
11	Pembayaran Pegawai		1.271.931.959.380,04	1.288.606.047.897,00
12	Pembayaran Barang dan Jasa		918.888.477.071,96	1.059.785.419.421,26
13	Pembayaran Bunga		0,00	3.692.580.279,00
14	Pembayaran Subsidi		834.852.991,00	844.301.180,00
15	Pembayaran Hibah		127.114.215.041,96	320.791.308.300,27
16	Pembayaran Bantuan Sosial		1.834.940.000,00	4.002.975.000,00
17	Pembayaran Tak Terduga		0,00	2.065.423.140,00
18	Pembayaran Bagi Hasil		690.951.661.944,00	749.291.201.015,00
19	Pembayaran Bantuan Keuangan		13.236.478.700,00	29.953.000.000,00
20	Jumlah Arus Keluar Kas (11 s.d 19)		3.024.572.875.128,96	3.484.951.185.226,53
21	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (9-20)		175.830.014.060,91	149.415.811.049,17
22	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	7.5.5.2.		
23	Arus Masuk Kas	7.5.5.2.1.		
24	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		69.710.000,00	0,00
25	Hasil Penjualan Aset Lainnya		442.374.414,00	0,00
26	Jumlah Arus Masuk Kas (24+25)		512.084.414,00	0,00
27	Arus Keluar Kas	7.5.5.2.2.		
28	Perolehan Tanah		992.100.000,00	920.100.000,00
29	Perolehan Peralatan dan Mesin		51.562.817.179,00	78.466.084.204,00
30	Perolehan Gedung dan Bangunan		80.799.981.394,06	128.103.861.833,55
31	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		48.310.371.998,10	36.781.752.579,47
32	Perolehan Aset Tetap Lainnya		329.702.535,00	1.668.740.000,00
33	Perolehan Aset Lainnya		120.680.500,00	0,00
34	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		5.000.000.000,00	0,00
35	Jumlah Arus Keluar Kas (28 s.d 34)		185.115.613.606,16	244.970.648.614,02
36	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (26-35)		(184.603.529.192,16)	(244.970.648.614,02)
37	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	7.5.5.3.		
38	Arus Masuk Kas	7.5.5.3.1.		
39	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
40	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat		82.836.000,00	100.883.706,00
41	Jumlah Arus Masuk Kas (39 s.d 40)		82.836.000,00	100.883.706,00
42	Arus Keluar Kas	7.5.5.3.2		
43	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah		0,00	91.945.787.633,00
44	Jumlah Arus Keluar Kas (43)		0,00	91.945.787.633,00
45	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (41-44)		82.836.000,00	(91.844.903.925,00)
46	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	7.5.5.4.		
47	Arus Masuk Kas	7.5.5.4.1.		
48	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		216.670.872.858,00	212.522.600.526,00
49	UYHD Tahun 2024		19.041.006,00	3.738.900,00
50	Pengembalian Jasa Giro Kas Lainnya Tahun 2024		236.913,06	2.941.227,25

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025 (AUDITED)	TAHUN 2024
51	Pengembalian Kas dari Bendahara Penerimaan		0,00	1.732.000,00
52	Pengembalian Dana SPP dari Kas BLUD		3.463.286,32	0,00
53	**Jumlah Arus Kas Masuk (48 s.d 52)**		**216.693.614.064,38**	**212.531.012.053,26**
54	**Arus Keluar Kas**	7.5.5.4.2.		
55	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		216.937.000.791,00	212.522.600.525,00
56	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
57	Jasa Giro Kas Lainnya		620.089,00	236.913,06
58	UYHD Tahun 2025		311.609.641,00	19.041.006,00
59	**Jumlah Arus Keluar Kas (55 s.d. 58)**		**216.948.130.421,00**	**212.541.878.445,06**
60	**ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS (53-59)**		**(255.516.356,62)**	**(10.866.391,81)**
61	**Kenaikan/ (Penurunan) Kas (21+38+45+60)**	7.5.5.5.	**(8.948.196.487,67)**	**(187.410.907.880,84)**
62	**Saldo Awal Kas di BUD**		**23.302.940.904,77**	**210.713.848.784,43**
63	**Saldo Akhir Kas di BUD (61+62)**	7.5.5.6.	**14.356.745.416,90**	**23.302.940.904,77**
64	Kas di Bendahara Pengeluaran		**311.609.641,00**	**19.041.006,00**
65	**Kas di BLUD**		**2.499.584.868,03**	**2.284.885.131,34**
66	Kas Lainnya		**201.711.431,00**	**524.292.876,64**
67	**Kas Dana BOSP**		**1.986.989.519,00**	**1.699.060.482,84**
68	**Saldo Akhir Kas (63 s.d 67)**		**19.356.640.775,93**	**27.810.220.201,59**

Gubernur Kepulauan Riau,

Ansar Ahmad

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025 (AUDITED)	TAHUN 2024
1	**EKUITAS AWAL**	7.5.6.1.	6.454.280.263.230,55	6.784.055.547.180,37
2	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	7.5.6.2.	(72.434.959.518,69)	(303.759.392.886,40)
3	**DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:**	7.5.6.3.		
	Koreksi Nilai Persediaan		136.060.877,00	10.026.024.201,81
	Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
	Lain-lain		23.971.350.964,72	(15.041.915.256,23)
4	**EKUITAS AKHIR (1+2+3)**	7.5.6.4.	**6.405.952.706.482,58**	**6.454.280.263.230,55**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Gubernur Kepulauan Riau,

Ansar Ahmad

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1. PENDAHULUAN

7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang disusun Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Secara umum, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, dengan menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Dalam memenuhi tujuan umum tersebut diatas, laporan keuangan tahun 2025 yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;

9. Pendapatan-LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan non-keuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 5);
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 893) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1081);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

25. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 52 Tahun 2025 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1072);
26. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1068);

7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ini mengacu pada sistematika penulisan laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, yaitu dengan format sebagai berikut:

7.1. Pendahuluan

- 7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

7.2. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah, Perkembangan Keuangan Daerah, Perkembangan Inflasi, Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Rupiah, Ketenagakerjaan Masyrakat dan Kesejahteraan, Prospek Perekonomian Daerah

- 7.2.1. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah
- 7.2.2. Perkembangan Keuangan Daerah
- 7.2.3. Perkembangan Inflasi
- 7.2.4. Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM
- 7.2.5. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
- 7.2.6. Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan
- 7.2.7. Prospek Perekonomian Daerah
- 7.2.8. Kebijakan Keuangan Daerah
- 7.2.9. Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- 7.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 7.3.2. Hambatan dan Kendala Yang ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
- 7.3.3. Kebijakan Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
- 7.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025
- 7.3.5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

7.3.6. Pencapaian Pemenuhan Mandatory Spending dalam APBD

7.4. Kebijakan Akuntansi

7.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

7.4.2. Komponen Utama Kebijakan Akuntansi

7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah yang terdiri dari:

7.5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

7.5.2. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL)

7.5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca

7.5.4. Laporan Operasional (LO)

7.5.5. Laporan Arus Kas (LAK)

7.5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

7.6. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah

7.7. Penutup

LAMPIRAN

7.2. PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI DAERAH, PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH, PERKEMBANGAN INFLASI, PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM, PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH, KETENAGAKERJAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN, PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH, KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH, PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

7.2.1. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah



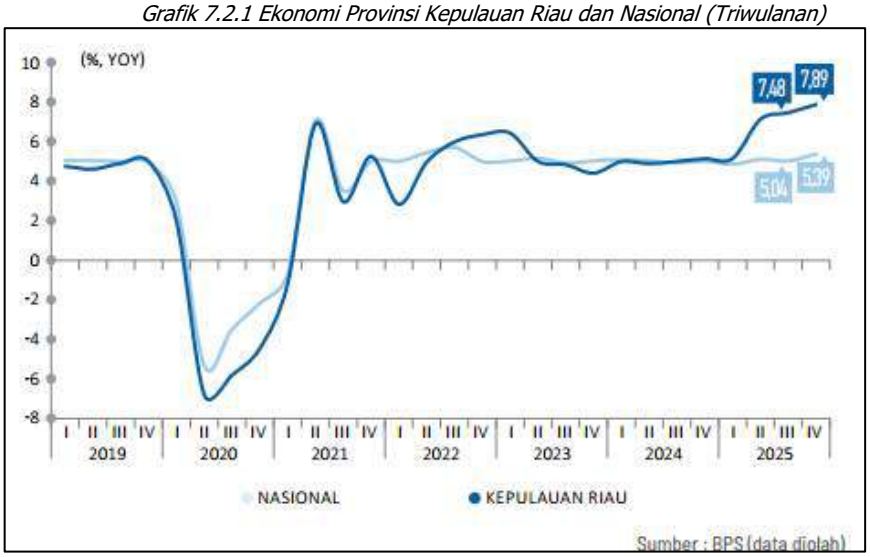
Dalam Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan IV 2025 tumbuh tinggi sebesar 7,89% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,48% (yoy). Capaian tersebut merupakan yang tertinggi di regional Sumatera yang secara keseluruhan tumbuh sebesar 4,54% (yoy) dan tertinggi keempat secara nasional. Secara kumulatif, sepanjang tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat sebesar 6,94% (ctc).

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan triwulan IV 2025 terutama ditopang oleh pertumbuhan Net Ekspor, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta Konsumsi Rumah Tangga. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi didukung oleh kinerja LU Industri Pengolahan, Pertambangan, serta Konstruksi.

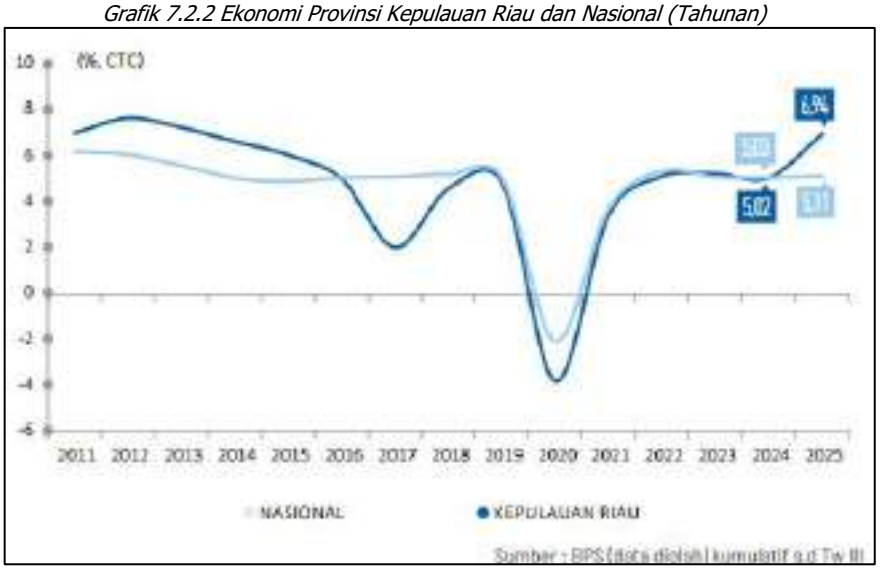
Sejalan dengan itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kepri pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp59.767,12 miliar atau tumbuh 7,89% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,48% (yoy). Kinerja tersebut terutama ditopang oleh beberapa LU utama yakni Industri Pengolahan, Pertambangan, dan Konstruksi. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tetap tinggi terutama didorong oleh kuatnya komponen Net Ekspor, PMTB, dan Konsumsi Rumah Tangga.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan IV 2025 lebih tinggi dibandingkan regional Sumatera yang tumbuh 4,54% (yoy) maupun capaian nasional yang tumbuh sebesar 5,39% (yoy). Pertumbuhan tertinggi di regional Sumatera dicapai oleh Kepri, Sumatera Selatan, dan Lampung masing-masing sebesar 7,89% (yoy), 5,54% (yoy), dan 5,54% (yoy). Adapun pangsa PDRB Kepri triwulan IV 2025 terhadap regional Sumatera tercatat sebesar 7,57%, atau terbesar kelima setelah Sumatera Utara (23,52%), Riau (22,79%), Sumatera Selatan (13,61%) dan Lampung (9,78%).

Grafik 7.2.1 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Triwulanan)



Grafik 7.2.2 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahunan)



Tabel 7.2.1 Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera



Tabel 7.2.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Pengeluaran (%yoy)

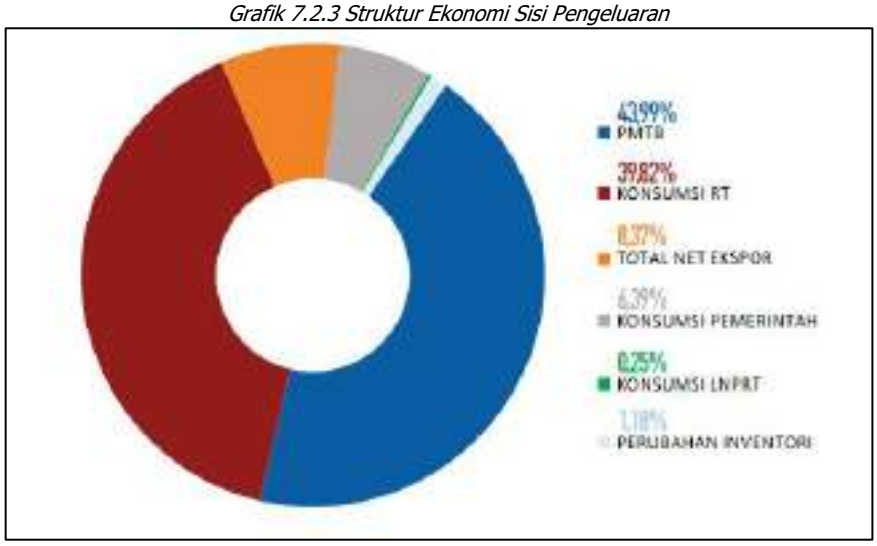


7.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Distribusi perekonomian Kepri pada triwulan IV 2025 didominasi oleh PMTB/investasi dengan pangsa sebesar 43,99%, diikuti Konsumsi Rumah Tangga sebesar 39,82% dari total PDRB. Tingginya pangsa komponen investasi dipengaruhi oleh masih berlanjutnya upaya pelaku usaha khususnya pada sektor industri dalam meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan barang modal serta investasi aset bangunan untuk ekspansi usaha. Selain itu, belanja modal pemerintah juga relatif besar terutama untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga memiliki pangsa tertinggi kedua dan tetap tumbuh positif sejalan dengan aktivitas pariwisata pada periode HBKN Nataru di triwulan IV.

Sementara itu, komponen net ekspor memiliki pangsa terbesar ketiga sebesar 8,37%, sejalan dengan nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan impor. Adapun konsumsi pemerintah menempati pangsa terbesar keempat yaitu sebesar 6,39%, didukung oleh berlanjutnya realisasi belanja pemerintah untuk program-program strategis.

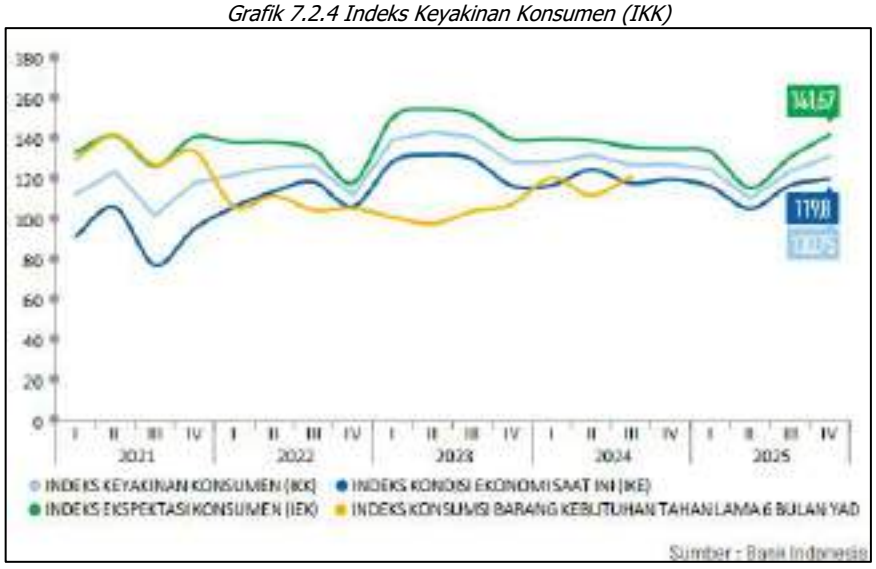
Grafik 7.2.3 Struktur Ekonomi Sisi Pengeluaran



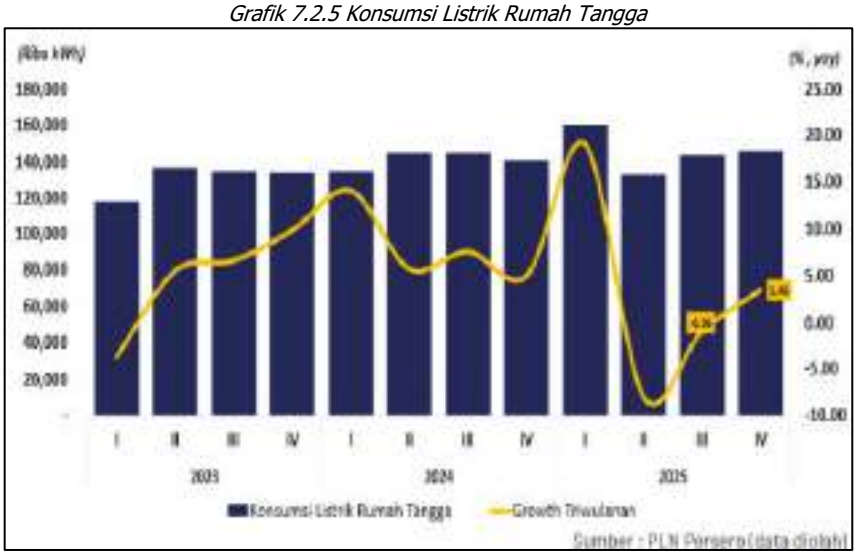
7.2.1.1.1. Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi Rumah Tangga (RT) pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 4,17% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,12% (yoy). Akselerasi konsumsi rumah tangga tercermin dari meningkatnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), dari 123,50 pada triwulan III 2025 menjadi 130,75 pada triwulan IV 2025. Hal ini menunjukkan optimisme masyarakat yang semakin kuat terhadap kondisi perekonomian saat ini. Selain itu, peningkatan konsumsi RT juga terindikasi dari membaiknya konsumsi listrik RT, dari sebelumnya terkontraksi 0,96% (yoy) menjadi tumbuh sebesar 3,46% (yoy). Lebih lanjut, akselerasi konsumsi RT pada triwulan IV 2025 juga didukung oleh momen libur HBKN Nataru dan aktivitas pariwisata yang mendorong belanja masyarakat.

Grafik 7.2.4 Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)



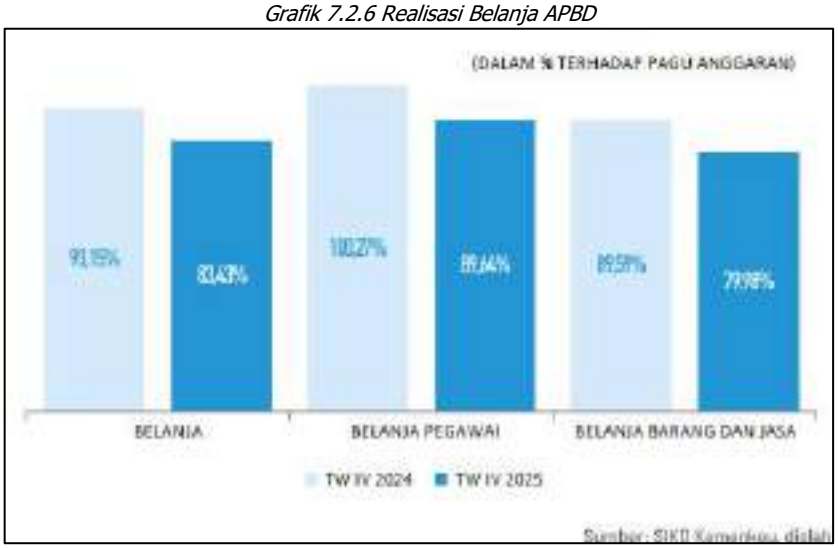
Grafik 7.2.5 Konsumsi Listrik Rumah Tangga



7.2.1.1.2. Konsumsi Pemerintah

Konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 3,72% (yoy), terakselerasi dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi 2,34% (yoy). Perbaikan tersebut sejalan dengan realisasi belanja modal di akhir tahun sebelum periode tutup tahun anggaran. Peningkatan realisasi belanja terjadi pada APBD Provinsi Kepri dan APBD Kota Tanjungpinang, yang masing-masing mencatatkan realisasi APBD hingga Desember 2025 sebesar 91,05% dan 92,85% dari pagu belanja.

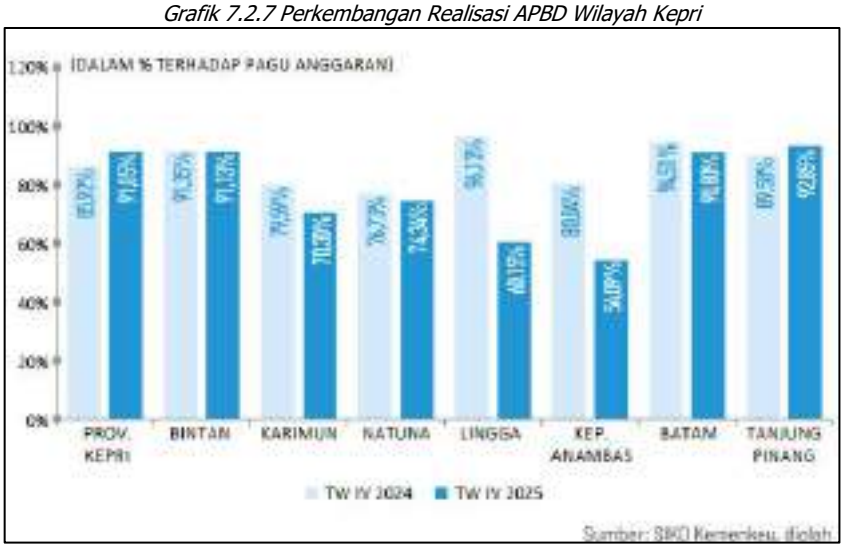
Grafik 7.2.6 Realisasi Belanja APBD



Di sisi lain, realisasi belanja seluruh Pemda di Kepri pada tahun 2025 menurun secara agregat menjadi sebesar sebesar 83,43% dari tahun 2024 yang realisasi belanja sebesar 93,15% dari pagu anggaran. Secara spasial, sebagian Pemda Kepri mencatat penurunan realisasi belanja pada triwulan IV 2025 dibandingkan triwulan sebelumnya, diantaranya terjadi di Kabupaten Bintan yang menurun dari 91,35% menjadi 91,13%, Kabupaten Karimun yang menurun dari 79,59% menjadi 70,30%, Kabupaten Natuna dari 76,73% menjadi 74,34%, Kabupaten Lingga dari 96,13% menjadi 60,15%, Kabupaten

Kepulauan Anambas dari 80,04% menjadi 54,09%, serta Kota Batam dari 94,51% menjadi 90,80%.

Grafik 7.2.7 Perkembangan Realisasi APBD Wilayah Kepri



7.2.1.1.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB

PMTB atau investasi di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 6,24% (yoy), terdeselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,05% (yoy). Deselerasi tersebut sejalan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tumbuh sebesar 68,06% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 169,76% (yoy). Penanaman Modal Asing (PMA) juga melambat dari yang sebelumnya tumbuh sebesar 0,17% (yoy), menjadi terkontraksi sebesar 22,73% (yoy). Meskipun terjadi pelambatan, keberlanjutan perkembangan PMDN dan PMA menunjukkan bahwa Kepri tetap menjadi salah satu tujuan investasi strategis di Indonesia.

Grafik 7.2.8 Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)



Grafik 7.2.9 Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)



7.2.1.1.4. Kegiatan Ekspor-Impor

Komponen net ekspor Kepri pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 27,02% (yoy), mengalami akselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 16,74% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan ekspor dan impor masing-masing tercatat lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Ekspor tumbuh sebesar 8,42% (yoy), atau terdeselerasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 11,47% (yoy). Sementara itu, impor juga tumbuh sebesar 6,80% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 10,94% (yoy). Ekspor yang terdeselerasi sejalan dengan nilai total ekspor (migas dan nonmigas) pada triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 11,76% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 20,41% (yoy).

Grafik 7.2.10 Perkembangan Ekspor Total Luar Negeri

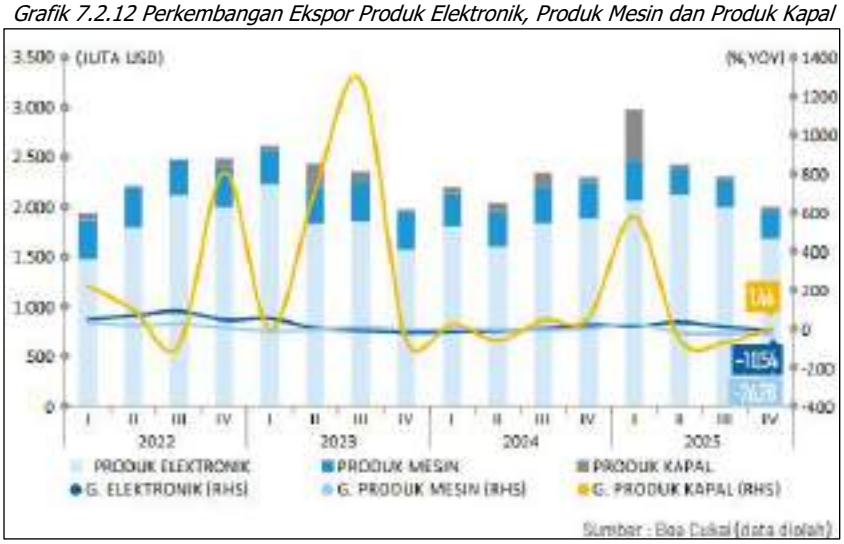


Grafik 7.2.11 Perkembangan Ekspor Komoditas Nonmigas dan Migas

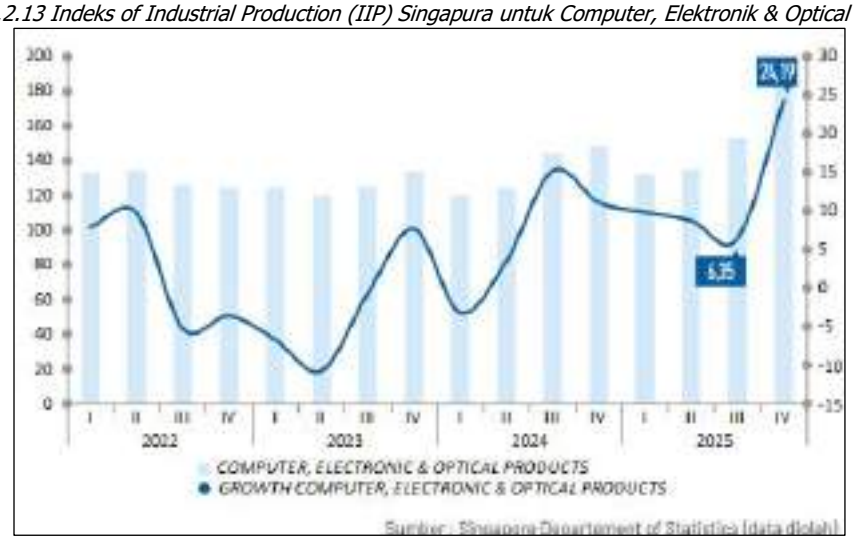


Kinerja ekspor Provinsi Kepri yang terdeselerasi sejalan dengan melambatnya ekspor migas dan normalisasi ekspor produk elektronik. Secara nominal, ekspor migas pada triwulan IV 2025 terkontraksi 27,72% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,04% (yoy). Nominal ekspor produk elektronik juga menurun, dari 8,72% (yoy) menjadi terkontraksi 10,54% (yoy), sejalan dengan normalisasi pasca fenomena *frontloading* di triwulan sebelumnya akibat dinamika tarif resiprokal. Lebih lanjut, kinerja ekspor produk mesin turut mengalami perlambatan. Nominal ekspor produk mesin pada triwulan IV 2025 terkontraksi sebesar 26,28% (yoy), lebih dalam dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 25,25% (yoy). Namun demikian, nominal ekspor produk kapal mengalami peningkatan dengan tumbuh sebesar 1,46% (yoy) lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi 73,59% (yoy). *Index of Industrial Production* (IIP) Singapura untuk *Computer, Electronic, & Optical Products* mengalami perbaikan pada triwulan IV, dari yang sebelumnya tumbuh 6,35% (yoy) menjadi 24,19% (yoy). Hal ini mengkonfirmasi kinerja net ekspor Kepri yang membaik didukung oleh permintaan yang tetap terjaga dari negara importir utama, yaitu Singapura.

Grafik 7.2.12 Perkembangan Ekspor Produk Elektronik, Produk Mesin dan Produk Kapal

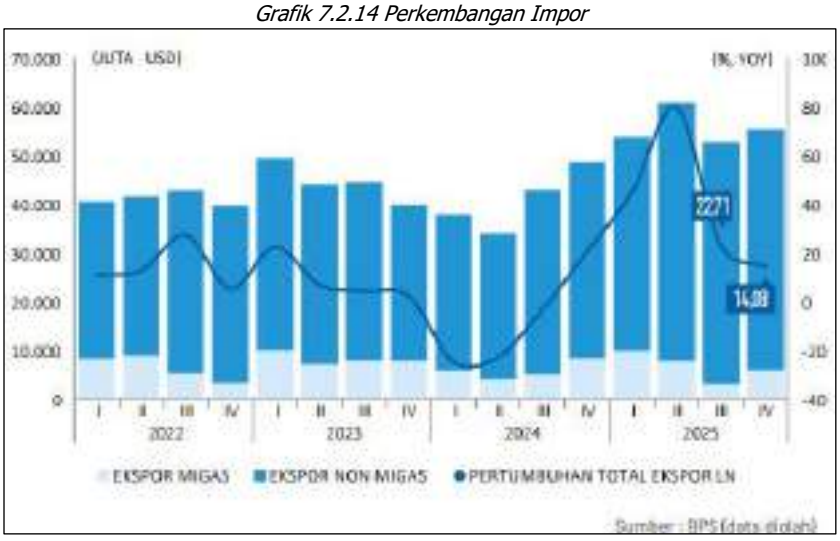


Grafik 7.2.13 Indeks of Industrial Production (IIP) Singapura untuk Computer, Elektronik & Optical Products



Sejalan dengan arah pertumbuhan ekspor yang melambat, PDRB impor turut mengalami deselerasi. Total impor Provinsi Kepri pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 14,08% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 22,71% (yoy). Melambatnya impor terutama disebabkan oleh penurunan impor barang modal. Nilai impor barang modal pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 13,46% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh tinggi sebesar 59,20% (yoy). Di sisi lain, impor bahan baku tumbuh sebesar 40,21% (yoy), mengalami peningkatan dari periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 30,00% (yoy). Lebih lanjut, Impor barang konsumsi turut tumbuh sebesar 14,92% (yoy), terakselerasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,09% (yoy).

Grafik 7.2.14 Perkembangan Impor



Grafik 7.2.15 Perkembangan Impor Nonmigas - BECA



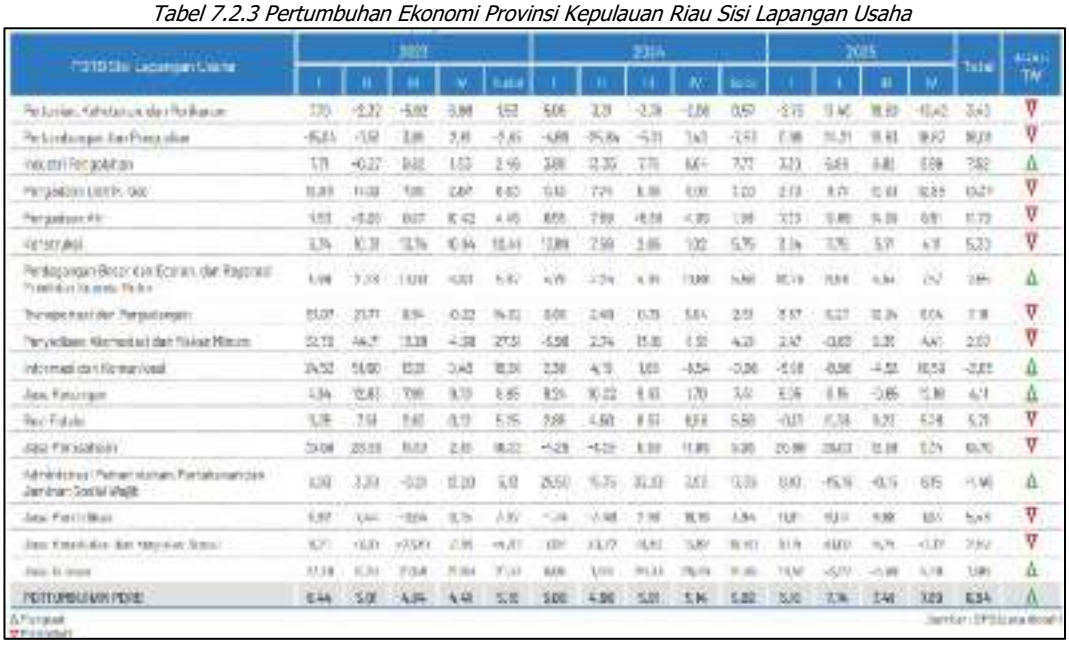
7.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha

Secara struktur, perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan IV 2025 masih didominasi oleh LU Industri Pengolahan dengan pangsa 41,57%. Pangsa terbesar kedua yakni LU Konstruksi sebesar 19,87%, diikuti LU Pertambangan dan Penggalian serta LU Perdagangan Besar dan Eceran masing-masing sebesar 10,06% dan 9,42%. Pertumbuhan LU Industri Pengolahan tetap baik sejalan dengan masih tingginya permintaan global terhadap produk elektronik. LU Konstruksi juga masih tumbuh sejalan dengan masih berlanjutnya sejumlah pembangunan infrastruktur. Kinerja LU Pertambangan dan Penggalian juga tumbuh positif sejalan dengan beroperasinya sejumlah proyek migas baru di Kepri. Adapun kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh sejalan dengan peningkatan aktivitas pariwisata serta belanja masyarakat.

Grafik 7.2.16 Konstribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (%)



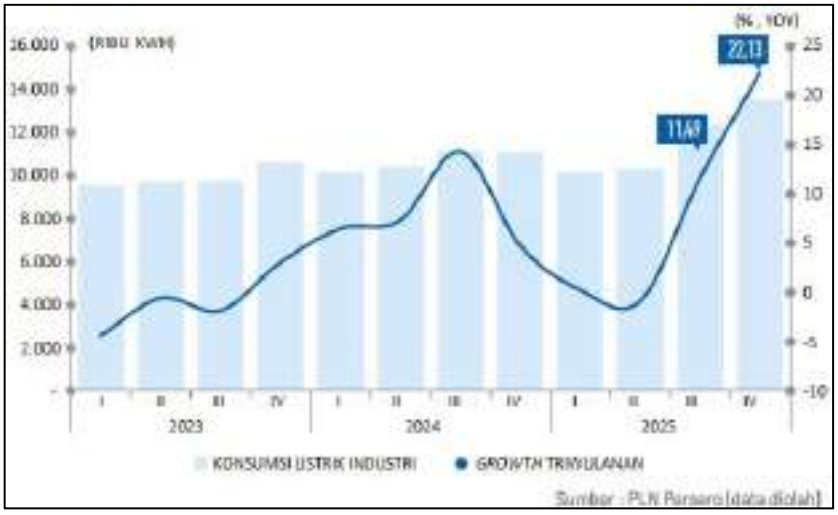
Tabel 7.2.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Lapangan Usaha



7.2.1.2.1. Lapangan Usaha Industri Pengolahan

LU Industri Pengolahan pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 8,89% (yoy), mengalami akselerasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,82% (yoy) dan memberikan andil 3,71% terhadap pertumbuhan Provinsi Kepri atau yang terbesar dibandingkan LU lainnya. Kinerja LU Industri Pengolahan yang meningkat tercermin dari peningkatan impor bahan baku yang tumbuh sebesar 40,21% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 30,00% (yoy). Selanjutnya, kuatnya kinerja industri pengolahan tercermin dari tingginya konsumsi listrik industri yang tumbuh 22,13% (yoy) pada triwulan IV 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 11,49% (yoy).

Grafik 7.2.17 Konsumsi Listrik Industri



Grafik 7.2.18 Perkembangan Impor Bahan Baku



7.2.1.2.2. Lapangan Usaha Konstruksi

LU Konstruksi pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 4,11% (yoy), terdeselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,71% (yoy). Melambatnya kinerja LU Konstruksi terkonfirmasi dari melambatnya penjualan semen di triwulan IV yang tercatat tumbuh 8,34% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 20,44%. Meskipun demikian, kinerja LU Konstruksi yang tetap positif didukung oleh pembangunan sejumlah ruas jalan serta Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang masih terus berlanjut.

Grafik 7.2.19 Perkembangan Pengadaan/Penjualan Semen



7.2.1.3. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor

Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 7,57% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,54% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan kredit sektor perdagangan yang meningkat dari 5,72% (yoy) menjadi 6,11% (yoy). Lebih lanjut, peningkatan pada LU perdagangan juga terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang menghasilkan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sektor perdagangan sebesar 1,60%, lebih

tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 1,51%. Penguatan kinerja lapangan usaha perdagangan utamanya didorong oleh masifnya aktivitas dan mobilisasi masyarakat pada periode HBKN Nataru.

Grafik 7.2.20 Kredit Sektor Perdagangan



Grafik 7.2.21 SBT Perdagangan



7.2.1.4. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

Pada triwulan IV 2025 kinerja LU Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 18,67% (yoy), atau mengalami deselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh mencapai 19,83% (yoy). LU Pertambangan yang tumbuh melambat ditunjukkan oleh ekspor migas yang juga tumbuh melambat dan terkontraksi sebesar 27,72% (yoy), terutama akibat ekspor hasil minyak yang turun dari sebelumnya tumbuh 37,23% (yoy) menjadi terkontraksi sebesar 43,36% (yoy). Ekspor minyak mentah dan ekspor gas alam juga mengalami perlambatan dari yang sebelumnya tumbuh masing-masing sebesar -16,69% (yoy) dan 333,22% (yoy) menjadi -20,51% (yoy) dan 45,49% (yoy) pada triwulan IV 2025.

Grafik 7.2.22 Perkembangan Ekspor Migas



7.2.2. Perkembangan Keuangan Daerah



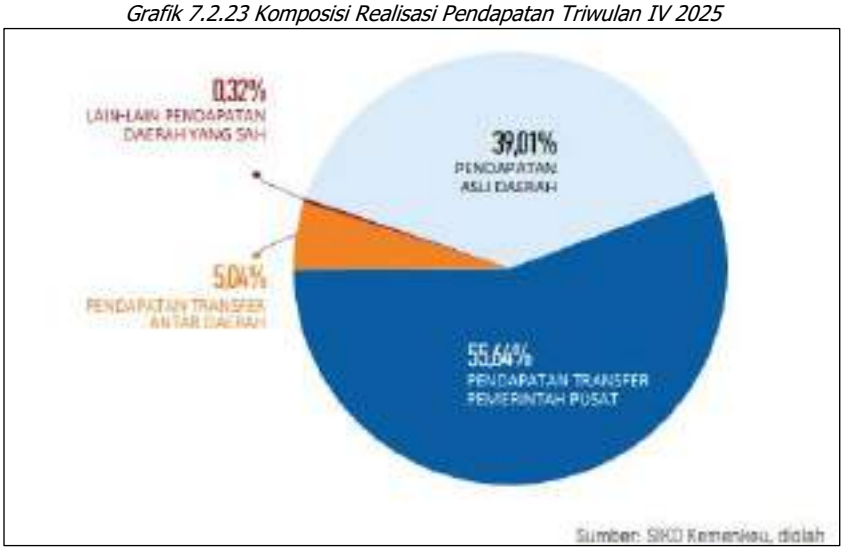
Realisasi total pendapatan Pemda di wilayah Provinsi Kepri sampai dengan triwulan IV 2025 tercatat sebesar 85,19%,sementara realisasi belanja mencapai 83,43% dari pagu anggaran. Realisasi pendapatan tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 94,66%, sedangkan realisasi juga belanja lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2024 yang mencapai 93,15%. Penurunan realisasi pendapatan terutama terjadi pada pos PAD dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Sementara itu, realisasi pos Pendapatan Transfer Antar Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, mengalami kenaikan dibandingkan triwulan IV tahun 2024. Di sisi lain, penurunan realisasi belanja utamanya disebabkan oleh penurunan pada pos Belanja Modal dan Belanja Transfer, namun penurunan lebih dalam tertahan oleh kenaikan realisasi Belanja Tidak Terduga yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

7.2.2.1. Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan seluruh Pemda di Kepri pada triwulan IV 2025 mencapai 85,19% dari pagu anggaran atau sebesar Rp12,65 triliun.Persentase realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2024 yang tercatat sebesar 94,66% dari pagu anggaran atau sebesar Rp14,01 triliun. Penurunan tersebut terutama berasal dari melemahnya realisasi pada pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan PAD. Meskipun demikian, penurunan yang lebih dalam tertahan dengan meningkatnya persentase pada pos Pendapatan Transfer Antar Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat pada triwulan IV 2025 mencapai Rp7,01 triliun atau sebesar 81,89% dari pagu anggaran. Komponen ini memiliki pangsa anggaran pendapatan dengan porsi terbesar yakni sebesar 56,09% dari pagu anggaran dengan capaian realisasi terbesar yaitu mencapai 55,45% dari total realisasi. Secara persentase, capaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai 93,98% dari pagu. Penurunan terjadi pada semua pos sub anggaran pendapatan yaitu pos Dana Perimbangan, Dana Insentif Fiskal, dan Dana Desa. Dari sisi nominal, realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat secara keseluruhan mengalami penurunan dari Rp8,39 triliun pada triwulan IV 2024 menjadi Rp7,01 triliun pada triwulan IV 2025.

Grafik 7.2.23 Komposisi Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2025



Realisasi PAD pada seluruh Pemda di Kepri hingga triwulan IV 2025 tercatat sebesar 87,47%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2024 yang tercatat 96,51% dari pagu anggaran. Secara nominal, realisasi ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp4,85 triliun menjadi sebesar Rp4,94 triliun pada triwulan IV 2025. Peningkatan nominal realisasi terutama disebabkan oleh peningkatan pos anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan pos Lain-lain PAD yang Sah. Realisasi pos Hasil Pengelolan Kekayaan yang Dipisahkan naik dari Rp29,89 miliar dari pagu sebesar Rp76,29 miliar pada triwulan IV 2024 menjadi Rp34,52 miliar dari pagu sebesar Rp37,94 miliar pada triwulan IV 2025. Lebih lanjut, realisasi pada pos Lain-Lain PAD yang Sah meningkat menjadi Rp396,94 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp342,27 miliar pada triwulan IV 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2024 yang terealisasi 57,07% atau Rp329,64 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp577,59 miliar.

Grafik 7.2.24 Perkembangan Realisasi Pendapatan Triwulan IV 2025



Peningkatan capaian PAD yang lebih tinggi tertahan akibat penurunan realisasi pos Pajak Daerah yang tercatat 86,42%, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 101,46% dan pos Retribusi Daerah yang tercatat 83,87%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 112,67%. Meskipun demikian, secara nominal realisasi pada pos Pajak Daerah di triwulan IV 2025 meningkat menjadi sebesar Rp3,98 triliun dari pagu angaran Rp4,60 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2024 yang terealisasi sebesar Rp3,93 triliun dari pagu anggaran Rp3,87 triliun. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan ekspektasi pendapatan daerah, bukan penurunan kinerja di tengah kebijakan realokasi anggaran.

Tabel 7.2.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan IV 2025

Berdasarkan wilayah kewenangan, realisasi pendapatan tertinggi pada triwulan IV 2025 dicapai Pemerintah Kota Batam dengan jumlah pendapatan sebesar Rp4,14 triliun atau 96,86% dari pagu anggaran. Realisasi pendapatan Kota Batam memiliki pangsa sebesar 32,76% dari total realisasi pendapatan pemerintah daerah se-Provinsi Kepri sehingga persentase realisasi Kota Batam mempengaruhi persentase realisasi pendapatan untuk seluruh wilayah Kepulauan Riau. Capaian realisasi tertinggi berikutnya yakni Kabupaten Bintan yang mencapai Rp1,24 triliun atau 94,73% dari pagu anggaran.

Selanjutnya, capaian realisasi tertinggi berikutnya yakni Kota Tanjungpinang sebesar Rp961 miliar atau 94,10% dari pagu anggaran tahun ini. Total Realisasi pendapatan pemerintah daerah se-Provinsi Kepulauan Riau mencapai 85,19% dari pagu anggaran.

Grafik 7.2.25 Realisasi Pendapatan pada masing-masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri



7.2.2.2. Realisasi Belanja

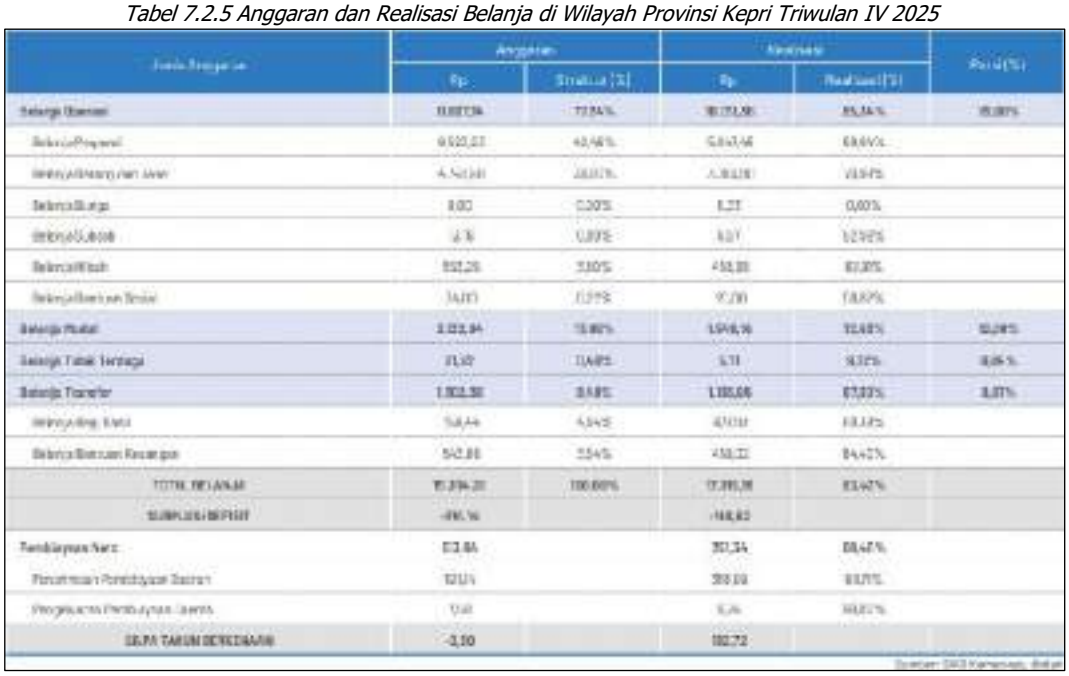
Realisasi belanja Pemda Kepri sampai dengan triwulan IV 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja Pemda hingga triwulan IV 2025 mencapai 83,43% dari pagu anggaran atau sebesar Rp12,81 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang tercatat 93,15% dari pagu anggaran atau sebesar Rp14,36 triliun. Pencapaian realisasi belanja yang menurun secara persentase terutama terjadi pada pos Belanja Operasi, pos Belanja Modal, dan pos Belanja Transfer. Sementara itu, realisasi pada pos Belanja Tidak Terduga tercatat mengalami peningkatan dari 7,76% pada triwulan IV 2024 menjadi 9,22% triwulan IV 2025. Realisasi belanja Pemda berdasarkan pos pengeluaran didominasi oleh Belanja Transfer dengan porsi 87,30%, diikuti Belanja Operasi sebesar 85,34%, Belanja Modal sebesar 72,63%, dan Belanja Tidak Terduga sebesar 9,22%. Secara nominal, total keseluruhan pagu anggaran belanja pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp15,36 triliun, lebih rendah dibandingkan total keseluruhan pagu anggaran belanja pada tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp15,42 triliun. Hal ini sejalan dengan semangat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2025.

Realisasi Belanja Operasi tercatat 85,34% dari pagu anggaran atau sebesar Rp10,12 triliun. Pencapaian realisasi tersebut lebih rendah baik secara nominal maupun persentase dibandingkan periode tahun sebelumnya yang mencapai 94,65% atau Rp11,16 triliun. Secara lebih rinci, realisasi Belanja Operasi didominasi pos Belanja Pegawai yang merupakan penyumbang terbesar dengan porsi 45,62% dari pagu anggaran, mencapai realisasi 89,64% atau sebesar Rp5,84 triliun. Realisasi pada pos Belanja Pegawai secara nominal meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp5,67triliun namun secara persentase menurun yang tercatat mencapai 100,27% pada triwulan IV 2024. Penurunan realisasi pos Belanja Operasi juga didorong oleh penurunan realisasi pos Belanja Barang dan Jasa, pos Belanja Bunga, pos Belanja Subsidi,

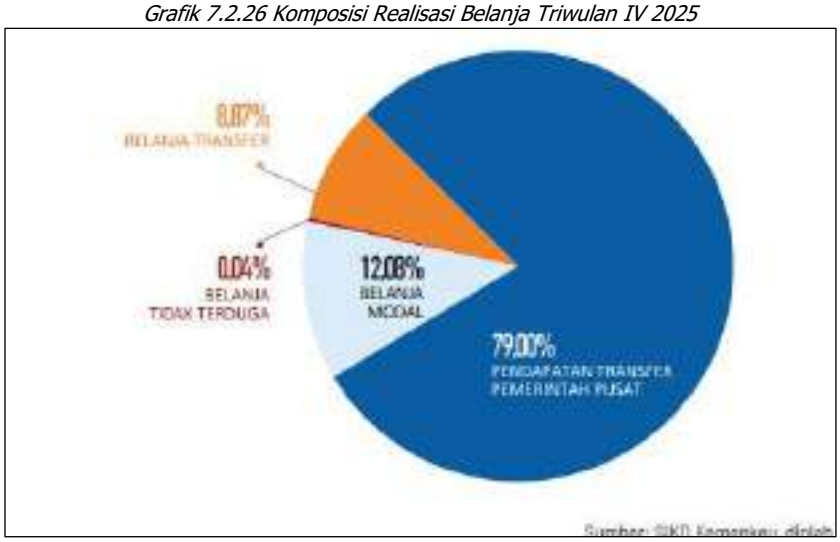
pos Belanja Hibah, dan pos Belanja Bantuan Sosial. Hal ini mengindikasikan penggunaan biaya untuk belanja barang dan jasa lebih efisien, sejalan dengan arahan presiden untuk realokasi belanja daerah.

Persentase realisasi Belanja Modal pada triwulan IV 2025 tercatat 72,63% dari pagu anggaran, tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2024 yang mencapai 86,61%. Secara nominal pagu pada pos Belanja Modal mengalami sedikit penurunan menjadi Rp2,13 triliun pada tahun 2025, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang tercatat Rp2,14 triliun. Pangsa Pos Belanja Modal sebesar 12,08% terhadap seluruh pos anggaran belanja, atau lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 12,92%. Realisasi pos Belanja Modal pada triwulan IV 2025 secara nominal tercatat melandai yakni sebesar Rp1,54 triliun, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat Rp1,85 triliun. Hal ini sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja pemerintah.

Tabel 7.2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan IV 2025



Grafik 7.2.26 Komposisi Realisasi Belanja Triwulan IV 2025



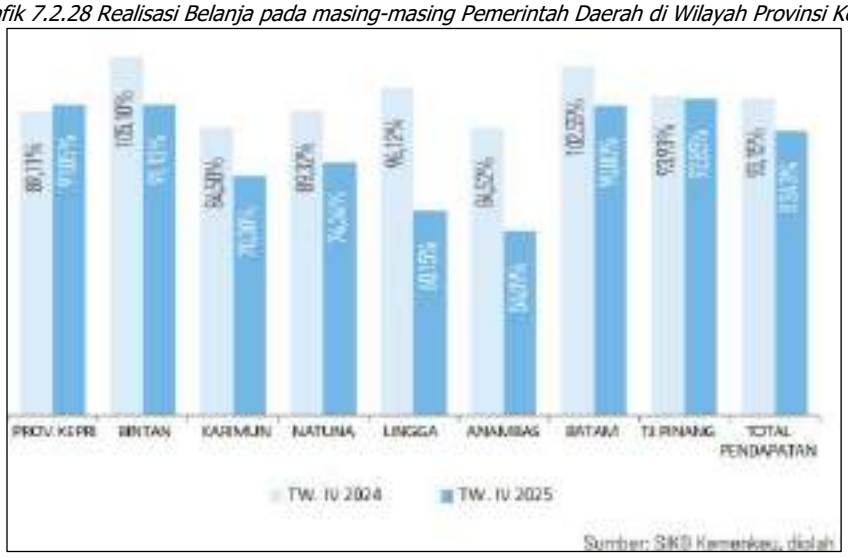
Pagu pos Belanja Transfer pada triwulan IV 2025 tercatat Rp1,30 triliun, lebih rendah dibandingkan pagu pada triwulan IV 2024 yang tercatat Rp1,41 triliun. Realisasi Belanja Transfer pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp1,13 triliun atau 87,30% dari pagu anggaran, menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,33 triliun atau 94,23% dari pagu anggaran. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan dengan realisasi pada pos Belanja Bagi Hasil yang tercatat 89,38% atau sebesar Rp677,93 miliar, lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 92,45% atau Rp790,51 miliar, serta penurunan realisasi pada pos Belanja Bantuan Keuangan yang tercatat 84,40% atau sebesar Rp459,02 miliar, lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 96,92% atau Rp546,76 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah melakukan pengetatan atau efisiensi anggaran pada pos yang sifatnya transfer ke pihak lain sebagai respon dari kebijakan pemerintah pusat dalam realokasi anggaran sehingga terjadi pergeseran prioritas belanja untuk lebih fokus ke program strategis.

Grafik 7.2.27 Perkembangan Realisasi Belanja Triwulan IV 2025



Berdasarkan wilayah kewenangan, realisasi belanja pada triwulan IV 2025 pemerintah daerah se-Provinsi Kepri mencapai 83,43% dari pagu anggaran. Secara persentase, pencapaian realisasi Belanja pemerintah daerah se-Provinsi Kepri tertinggi dicapai oleh Kota Tanjungpinang, diikuti persentase realisasi belanja Kabupaten Bintan dan persentase realisasi belanja Provinsi Kepri. Capaian realisasi Kota Tanjungpinang tercatat 92,85% dari pagu anggaran atau sebesar Rp961,97 miliar. Lebih lanjut, capaian realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Bintan tercatat sebesar Rp1,24 triliun atau 91,13% dari pagu anggaran dan capaian realisasi belanja Provinsi Kepri tercatat sebesar Rp3,58 triliun atau sebesar 91,05% dari pagu anggaran. Meski demikian, Kota Batam memiliki pangsa realisasi belanja terbesar untuk seluruh pemerintah daerah di Kepri dengan pangsa sebesar 31,26%.

Grafik 7.2.28 Realisasi Belanja pada masing-masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri



7.2.2.3. Anggaran dan Realisasi APBN di Wilayah Kepri

Secara keseluruhan pada 2025, target pendapatan APBN di Kepri meningkat, namun target belanja APBN tercatat menurun dibandingkan tahun 2024 sejalan dengan kebijakan realokasi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat. Pada tahun 2025, target Pendapatan APBN mengalami peningkatan tercatat sebesar Rp18,05 triliun dari Rp14,92 triliun pada tahun 2024. Sementara, target Belanja APBN mengalami penurunan menjadi sebesar Rp16,40 triliun dari Rp18,64 triliun pada tahun 2024. Peningkatan target anggaran Pendapatan terutama terjadi pada pos Penerimaan Perpajakan dengan target menjadi Rp15,38 triliun. Sementara itu, penurunan anggaran Belanja terutama terjadi pada pos anggaran Belanja Pemerintah Pusat menjadi Rp8,35 triliun pada triwulan IV 2025 dari Rp10,45 triliun pada triwulan IV 2024.

Realisasi pendapatan APBN di wilayah Kepri sampai dengan triwulan IV 2025 tercatat 78,92%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 93,26% dari pagu anggaran. Persentase realisasi yang menurun ini terjadi pada pos Penerimaan Perpajakan dan pos PNBP sejalan dengan target pendapatan yang meningkat. Persentase realisasi pada pos Penerimaan Perpajakan tercatat 73,37% dari pagu, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2024 yang mencapai 86,96% dari pagu. Selanjutnya, pada pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan persentase realisasi

110,84% pada triwulan IV 2025, lebih rendah dari 121,73% pada triwulan IV 2024. Meskipun demikian, secara nominal realisasi pendapatan APBN tercatat sebesar 14,25 triliun pada triwulan IV 2025, meningkat dari triwulan IV 2024 yang tercatat sebesar Rp13,91 triliun sejalan dengan peningkatan target pendapatan APBN. Hal ini menunjukkan optimisme pemerintah daerah terhadap ekspansi ekonomi yang diharapkan terdapat peningkatan realisasi pendapatan.

Dengan target penerimaan pajak yang meningkat pada tahun 2025, secara umum pertumbuhan penerimaan pajak tumbuh 6,24% (yoy). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan realisasi pada pos Pajak Dalam Negeri yang tercatat Rp10,37 triliun, pos Pajak Penghasilan yang tercatat Rp9,01 triliun, pos Pajak Pertambahan Nilai yang tercatat sebesar Rp1 triliun, pos Pajak Perdagangan Internasional yang tercatat sebesar Rp908,87 miliar, tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Di sisi lain, persentase realisasi pendapatan APBN pada pos PNBP triwulan IV 2025 tercatat mengalami kontraksi 10% (yoy) atau sebesar Rp2,96 triliun. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan IV tahun 2024 yang tercatat 121,73% dari target atau sebesar Rp3,29 triliun. Hal ini disebabkan oleh penerimaan Pendapatan BLU yang terkontraksi, tercatat Rp2,15 triliun pada triwulan IV 2025, lebih rendah dari triwulan IV 2024 yang tercatat Rp2,48 triliun, sejalan dengan penurunan target dari pos Pendapatan BLU. Sementara itu, penurunan yang lebih dalam tertahan oleh realisasi pada PNBP Lainnya yang secara nominal tercatat Rp811,44 miliar atau 155,28% dari target, tumbuh 0,47% (yoy).

Tabel 7.2.6 Akumulasi Anggaran dan Realisasi Belanja APBN di Wilayah Provinsi Kepri



Realisasi belanja APBN di wilayah Kepri sampai dengan triwulan IV 2025 mencapai 92,74% dari pagu atau sebesar Rp15,21 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2024 yang mencapai 96,16% dari pagu atau sebesar Rp17,92 triliun. Realisasi belanja APBN di wilayah Kepri sampai dengan triwulan IV 2025 terkontraksi 15,11% (yoy) yang disebabkan oleh efisiensi belanja pada satuan kerja. Penurunan realisasi terjadi pada pos Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD) yang masing-masing hanya mencapai 87,84% dan 97,81% dari target, lebih rendah dari triwulan IV 2024 yang masing-masing tercapai 94,54% dan 98,23% dari target. Penurunan komponen Belanja Pemerintah Pusat terutama terjadi pada Belanja Modal yang terkontraksi 67,35% (yoy), disusul Belanja Barang yang terkontraksi 15,20% (yoy) dan Belanja Lainnya yang terkontraksi 2,44% (yoy). Di samping itu, komponen Transfer ke Daerah (TKD) pada triwulan IV 2025 terkontraksi sebesar 2,01% (yoy) terutama disebabkan oleh penurunan pada DAK Fisik yang terkontraksi 56,21% (yoy), Dana Desa yang terkontraksi 7,62% (yoy), dan Dana Bagi Hasil yang terkontraksi sebesar 4,46% (yoy). Meski demikian, terjadi peningkatan realisasi Dana Insentif Fiskal, DAK Non Fisik, dan Dana Alokasi Umum (DAU) berturut-turut sebesar 29,18% (yoy), 15,13% (yoy), dan 0,74% (yoy). Hal ini

dipengaruhi oleh relaksasi kebijakan efisiensi TKD dan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan anggaran mendukung program strategis daerah dan nasional.

Realisasi anggaran belanja infrastruktur APBN di Kepri telah terserap 75,28% atau Rp823,19 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar 96,28% atau sebesar Rp1,76 triliun. Postur APBN pendukung proyek infrastruktur Kepri utamanya ditopang oleh realisasi proyek program konektivitas laut yang tercatat mencapai 98,29% dari pagu anggaran atau sebesar Rp200,54 miliar. Pengembangan konektivitas laut tersebut meningkat sejalan dengan lanjutan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan pelabuhan, pengembangan pelabuhan bongkar muat Batu Ampar, pembangunan pelabuhan kapal ikan, dan peningkatan Jalan Pelabuhan Parit I di Kab. Karimun. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercapai 86,57%. Realisasi terbesar kedua adalah realisasi proyek Program Ketahanan Sumber Daya Air dengan realisasi sebesar 98,28%, proyek Konektivitas Udara sebesar 83,97%, dan proyek Konektivitas Darat sebesar 61,00%.

Tabel 7.2.7 Anggaran Belanja Infrastruktur APBN Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

No	Jenis Proyek	Triwulan IV 2024			Triwulan IV 2025		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Konektivitas Udara	64,06	58,54	91,38%	20,19	16,96	83,97%
2	Konektivitas Laut	412,68	344,04	86,57%	204,03	200,54	98,29%
3	Konektivitas Darat	1.149,88	1.141,70	99,29%	667,14	406,96	61,00%
4	Program Ketahanan Sumber Daya Air	221,08	219,92	99,48%	202,21	198,74	98,28%
Total		**1.847,70**	**1.764,22**	**96,28%**	**1.093,57**	**823,19**	**75,28%**

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri

7.2.3. Perkembangan Inflasi



Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Triwulan IV 2025 tercatat sebesar 3,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,70% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi utamanya didorong oleh peningkatan andil inflasi dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, serta Kelompok Transportasi. Dengan perkembangan tersebut, inflasi pada Triwulan IV 2025 masih berada dalam target inflasi sebesar 2,5±1% (yoy).

Inflasi Kepri Triwulan IV 2025 tercatat sebesar 3,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,70% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi terutama didorong oleh andil Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 1,49% (yoy), Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang memberikan andil 1,06% (yoy), Kelompok Transportasi yang memberikan andil 0,29% (yoy), Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran yang memberikan andil 0,26% (yoy), serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang memberikan andil 0,16% (yoy). Secara spasial, inflasi meningkat pada dua kota cakupan IHK sedangkan 1 kabupaten IHK di Kepri mengalami penurunan inflasi. Di Kota Batam inflasi tercatat lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yakni dari 2,82% (yoy) menjadi 3,67% (yoy). Di Kota Tanjungpinang inflasi tercatat 2,75% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 1,82% (yoy). Sementara itu, inflasi di Kabupaten Karimun tercatat sebesar 2,72% (yoy) namun lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi 2,91% (yoy). Pada periode yang sama, inflasi Nasional meningkat dari 2,65% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi sebesar 2,92% (yoy) pada Triwulan IV 2025.

Secara bulanan, IHK Kepri pada triwulan IV 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 1,14% (mtm), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,64% (mtm). Inflasi bulanan pada triwulan IV 2025 terutama didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami inflasi 2,91% (mtm) dengan andil 0,85% (mtm). Kenaikan pada kelompok ini didorong oleh meningkatnya harga cabai rawit, daging ayam

ras, cabai merah, bayam, kangkung, buncis, bawang merah, dan telur ayam ras. Peningkatan harga cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan akibat bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah sentra produksi. Sementara itu, kenaikan harga sayuran seperti kangkung, bayam, dan sawi hijau didorong oleh pasokan yang terbatas seiring mulai memasuki musim hujan yang meningkatkan kelembapan dan mengakibatkan sayuran lebih cepat rusak. Selain itu, kenaikan harga daging ayam ras sejalan dengan naiknya konsumsi menjelang HBKN Nataru, serta adanya kenaikan biaya produksi yang dipengaruhi oleh kenaikan harga pakan.

Penyebab inflasi juga berasal dari Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang tercatat inflasi sebesar 1,63% (mtm) dengan andil 0,12% (mtm), sejalan dengan kenaikan harga emas perhiasan yang mengikuti tren harga emas global di tengah dinamika ketidakpastian global, termasuk ketegangan geopolitik dan kebijakan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat. Kelompok Transportasi turut mencatatkan inflasi sebesar 1,13% (mtm) dengan andil 0,16% (mtm), terutama dipengaruhi oleh peningkatan tarif angkutan udara seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas pariwisata pada periode libur Nataru.

Tabel 7.2.8 Inflasi Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, Kota Batam dan Kab. Karimun (%, yoy)

Kelompok	2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Inflasi Nasional	4,97	3,52	2,28	2,61	3,05	2,51	1,84	1,57	1,03	1,87	2,65	2,92
Inflasi Kepri	4,77	2,64	2,05	2,76	3,37	3,54	2,53	2,09	2,01	1,32	2,70	3,47
Inflasi Tanjungpinang	4,28	1,78	1,53	2,14	2,68	2,97	1,36	1,53	0,07	0,07	1,82	2,75
Inflasi Batam	4,83	2,75	2,12	2,85	3,56	3,71	2,76	2,24	2,53	1,68	2,82	3,67
Inflasi Karimun					2,57	2,79	2,04	1,57	0,15	-0,15	2,91	2,72

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 7.2.9 Penyumbang Inflansi Bulanan Provinsi Kepri Desember 2025

No	Komoditas	Kelompok	Andil Inflasi (%, mtm)
1	Cabai Rawit	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,21
2	Angkutan Udara	Transportasi	0,16
3	Daging Ayam Ras	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,13
4	Emas Perhiasan	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,13
5	Cabai Merah	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,07
6	Bayam	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,06
7	Kangkung	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,05
8	Buncis	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,04
9	Bawang Merah	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,04
10	Telur Ayam Ras	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,03

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 7.2.10 Penyumbang Deflasi Bulanan Provinsi Kepri Desember 2025

No	Komoditas	Kelompok	Andil Deflasi (%, mtm)
1	Angkutan Laut	Transportasi	-0,02
2	Ikan Selar/ Ikan Tude	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01
3	Sabun Mandi Cair	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	-0,01
4	Kentang	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,005
5	Ikan Tongkol/ Ikan Ambu-Ambu	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,004
6	Jeruk	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,003
7	Mie Kering Instant	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,003
8	Susu Bubuk Untuk Balita	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,003
9	Santan Segar	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,003
10	Popok Bayi Sekali Pakai/ Diapers	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	-0,003

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 7.2.11 Penyumbang Inflasi Tahunan Provinsi Kepri Desember 2025

No	Komoditas	Kelompok	Andil Deflasi (%, yoy)
1	Emas Perhiasan	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	1,01
2	Cabai Merah	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,48
3	Angkutan Udara	Transportasi	0,23
4	Cabai Rawit	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,21
5	Daging Ayam Ras	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,20
6	Sewa Rumah	Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,14
7	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,11
8	Akademi/Perguruan Tinggi	Pendidikan	0,08
9	Nasi Dengan Lauk	Penyediaan Makanan Dan Minuman/ Restoran	0,06
10	Daging Sapi	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,06

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 7.2.12 Penyumbang Deflasi Tahunan Provinsi Kepri Desember 2025

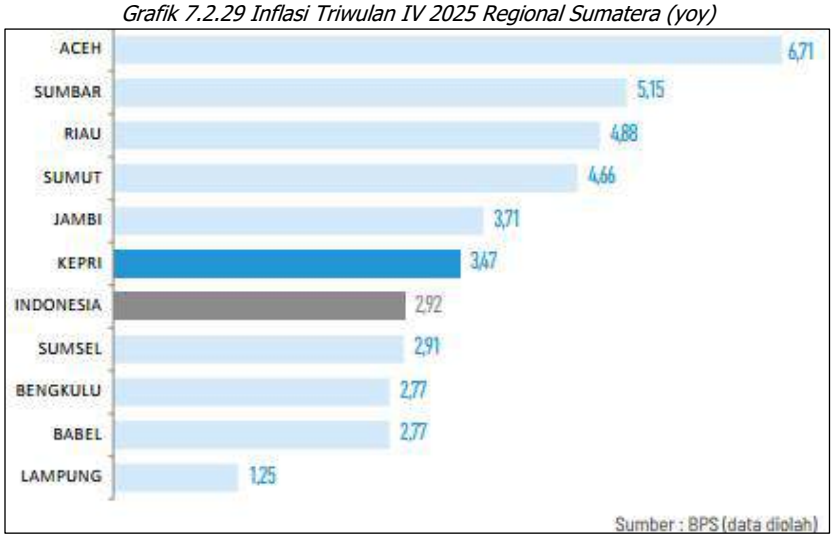
No	Komoditas	Kelompok	Andil Deflasi (%, mtm)
1	Bawang Merah	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,14
2	Tomat	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,06
3	Bawang Putih	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,04
4	Angkutan Laut	Transportasi	-0,02
5	Sabun Mandi Cair	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	-0,02
6	Kacang Panjang	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01
7	Sawi Hijau	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01
8	Susu Bubuk Untuk Balita	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01
9	Ikan Kembung/Ikan Gembung/ Ikan Banyar/Ikan Gembolo/ Ikan Aso-Aso	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01
10	Ayam Hidup	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01

Sumber: BPS (data diolah)

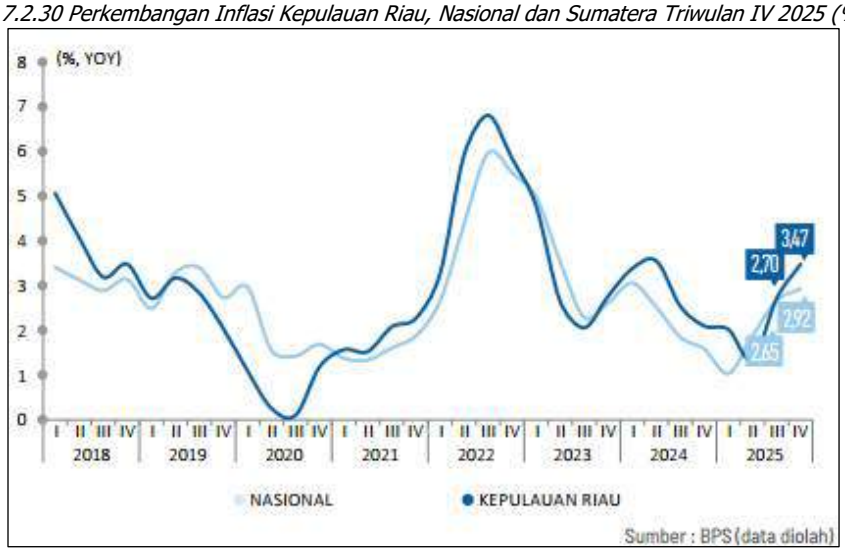
7.2.3.1. Perkembangan Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa

Berdasarkan perkembangan inflasi kelompok barang dan jasa, peningkatan tekanan inflasi Kepri pada Triwulan IV 2025 terutama didorong oleh Kelompok kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang tercatat inflasi 5,07% (yoy) dengan andil 1,49% (yoy). Kelompok Perawatan dan Jasa Pribadi Lainnya turut mengalami inflasi sebesar 16,68% (yoy) dengan andil 1,06% (yoy). Selain itu, Kelompok Transportasi juga mengalami inflasi 2,11% (yoy) dengan andil 0,29% (yoy).

Grafik 7.2.29 Inflasi Triwulan IV 2025 Regional Sumatera (yoy)



Grafik 7.2.30 Perkembangan Inflasi Kepulauan Riau, Nasional dan Sumatera Triwulan IV 2025 (% yoy)



Tekanan inflasi pada Kelompok Makanan minuman dan tembakau memberikan andil sebesar 1,49% (yoy) disebabkan oleh kenaikan harga cabai merah sebesar 0,48% (yoy), cabai rawit 0,21% (yoy), daging ayam ras 0,20% (yoy), sigaret kretek mesin (SKM) 0,11% (yoy), dan daging sapi 0,06% (yoy). Inflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya didorong oleh kenaikan harga perhiasan sejalan dengan tren meningkatnya harga emas global yang ditengah ketidakpastian global yang dipengaruhi oleh berlanjutnya ketegangan geopolitik serta ketidakpastian kebijakan perdagangan, termasuk penetapan tarif resiprokal. Sementara itu, inflasi pada kelompok transportasi disebabkan oleh kenaikan tarif angkutan udara dengan andil 0,23% (yoy) sejalan dengan meningkatnya permintaan dan mobilitas masyarakat pada periode HBKN Nataru

Tabel 7.2.13 Inflasi Tahunan Kepulauan Riau Menurut Kelompok Barang dan Jasa (% yoy)

No	Kelompok	2024								2025							
		I		II		III		IV		I		II		III		IV	
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	1,87	6,38	1,87	6,46	1,80	6,48	0,72	2,46	0,08	2,18	-0,74	-0,14	3,42	4,88	1,44	3,07
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,70	2,05	0,55	2,20	0,21	2,19	0,16	2,19	0,08	1,91	0,00	2,44	0,05	1,53	0,00	1,28
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,74	0,99	0,74	0,80	0,79	2,42	0,42	2,85	0,25	1,91	0,46	2,84	0,07	1,04	0,18	0,99
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,21	0,23	-0,01	-0,44	0,08	0,33	-0,01	-0,21	-0,03	-0,25	0,00	-0,01	-0,01	-0,19	0,08	0,21
5	Kesehatan	0,08	3,55	1,08	3,45	0,08	3,62	0,16	4,24	0,01	0,52	0,00	0,07	3,04	1,80	0,04	1,70
6	Transportasi	2,90	4,73	0,56	4,04	0,47	3,39	0,16	7,13	0,74	1,71	0,17	1,76	-0,08	-0,99	0,16	1,9
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,00	0,62	1,80	0,05	0,08	0,84	0,01	0,31	0,03	0,33	0,01	0,02	0,01	0,09	0,00	0,81
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	-0,81	-0,25	1,80	-0,01	0,08	-0,74	0,08	0,08	0,01	0,11	0,21	0,34	0,21	0,01	0,01	0,01
9	Pendidikan	0,37	1,41	0,11	1,41	-0,15	-1,19	0,15	-1,14	-0,15	-1,01	-0,15	-1,04	1,06	1,41	0,06	1,12
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,13	1,01	0,18	1,18	0,14	1,01	0,12	1,42	0,29	2,07	0,25	2,45	0,16	2,67	0,24	1,78
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,28	4,54	2,42	0,18	0,46	23,2	0,48	0,2	0,81	10,83	1,89	0,85	0,78	12,48	1,18	10,58
	Umum	3,59		5,34		2,93		2,09		3,01		1,32		2,35		3,47	

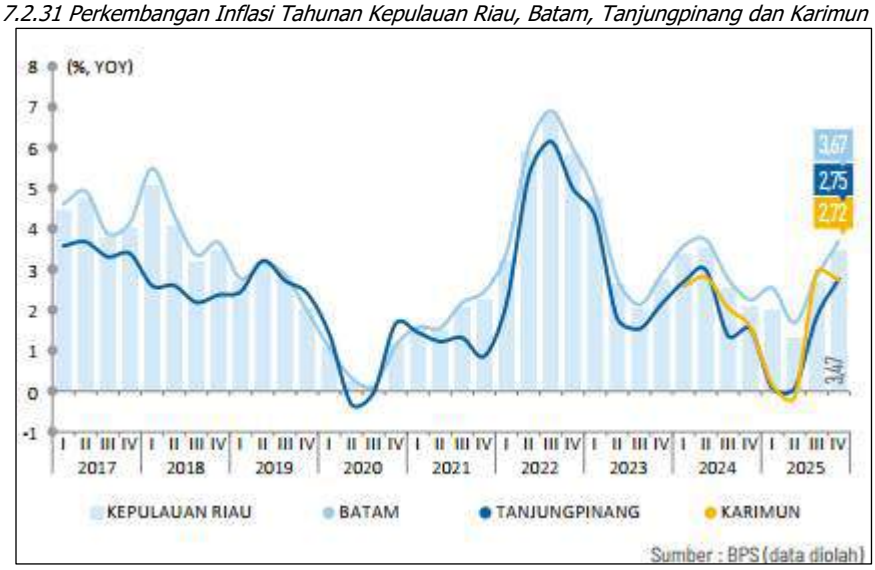
Sumber : BPS (data diolah)

7.2.3.2. Perkembangan Inflasi Menurut Kota/Kabupaten

Secara spasial, ketiga Kota/Kabupaten IHK di Kepri yakni Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun pada Triwulan IV 2025 tercatat mengalami inflasi. Inflasi Kota Batam tercatat sebesar 3,67% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,82% (yoy). Tekanan inflasi juga terjadi di Kota

Tanjungpinang dengan inflasi sebesar 2,75% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,82% (yoy). Sementara itu, Kabupaten Karimun mencatatkan inflasi sebesar 2,72% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,91% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, inflasi Kepri pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 3,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,70% (yoy).

Grafik 7.2.31 Perkembangan Inflasi Tahunan Kepulauan Riau, Batam, Tanjungpinang dan Karimun (% yoy)



7.2.3.2.1. Inflasi Kota Batam

Secara tahunan, Kota Batam pada Triwulan IV 2025 mengalami inflasi sebesar 3,68% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,82% (yoy). Tekanan Inflasi tersebut disebabkan oleh meningkatnya inflasi kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 5,17% (yoy) dengan andil 1,49% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 4,94% (yoy) dengan andil 1,41% (yoy). Selain itu, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya tercatat sebesar 18,03% (yoy) dengan andil 1,13% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang mencatatkan inflasi 13,62% (yoy) dengan andil 0,84% (yoy). Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran juga mengalami inflasi sebesar 3,38% (yoy) dengan andil 0,31% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,96%(yoy) dengan andil 0,27% (yoy).

Secara bulanan, Kota Batam pada Desember 2025 tercatat inflasi sebesar 1,14% (mtm), lebih tinggi dibandingkan September 2025 sebesar 0,62% (mtm) terutama didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Transportasi, serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tercatat mengalami inflasi 2,88% (mtm) dengan andil 0,83% (mtm), didorong oleh kenaikan harga cabai rawit yang memberikan andil 0,19% (mtm), daging ayam ras sebesar 0,15% (mtm); cabai merah sebesar 0,08% (mtm), bayam sebesar 0,06% (mtm), dan kangkung sebesar 0,06% (mtm). Tekanan inflasi pada Kelompok Transportasi sebesar 1,41% (mtm) dengan andil 0,19% (mtm) sejalan dengan kenaikan tarif angkutan udara akibat tingginya permintaan masyarakat pada periode HBKN Nataru. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya turut mengalami inflasi sebesar 1,63% (mtm) dengan andil 0,12%

(mtm) sejalan dengan kenaikan harga emas perhiasan yang memberikan andil 0,13% (mtm) di tengah berlanjutnya ketidakpastian global. Sementara itu, peningkatan tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan dengan penurunan harga pada Kelompok Kesehatan serta Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga yang masing - masing tercatat mengalami deflasi sebesar 0,03% (mtm) dan 0,06% (mtm).

7.2.3.2.2. Inflasi Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang pada Triwulan IV 2025 mengalami inflasi sebesar 2,75% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,82% (yoy). Tekanan inflasi tersebut didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang tercatat inflasi 4,97% (yoy) dengan andil 1,42% (yoy) sejalan dengan kenaikan harga komoditas pokok seperti cabai merah, cabai rawit, ikan selar/tude, dan daging ayam ras. Selain itu, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya tercatat inflasi sebesar 15,82% (yoy) dengan andil 0,99% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi 10,53% (yoy) dengan andil 0,66% (yoy). Hal ini disebabkan oleh peningkatan harga emas perhiasan sejalan dengan berlanjutnya ketidakpastian global, terutama dinamika geopolitik. Kelompok Transportasi turut menjadi pendorong inflasi dengan nilai sebesar 3,36% (yoy) dan andil 0,49% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,50% (yoy) dengan andil 0,22% (yoy). Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan tarif angkutan udara pada periode HBKN Nataru.

Secara bulanan, inflasi Kota Tanjungpinang pada Desember 2025 meningkat menjadi 1,28% (mtm), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi 0,54% (mtm). Kenaikan ini didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 3,78% (mtm) dengan andil 1,07% (mtm), Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 2,10% (mtm) dengan andil 0,15% (mtm), serta Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,69% (mtm) dengan andil 0,03% (mtm). Hal tersebut utamanya disebabkan oleh kenaikan harga komoditas seperti cabai rawit dengan andil 0,20% (mtm), bawang merah dengan andil 0,14% (mtm), emas perhiasan dengan andil 0,13% (mtm), daging ayam ras dengan andil 0,12% (mtm), wortel dengan andil 0,07% (mtm), dan gula pasir dengan andil 0,06% (mtm). Sementara itu, tekanan inflasi lebih tinggi tertahan dengan penurunan beberapa komoditas antara lain santan segar, angkutan laut, udang basah, ikan tamban, susu cair kemasan, dan ikan tongkol.

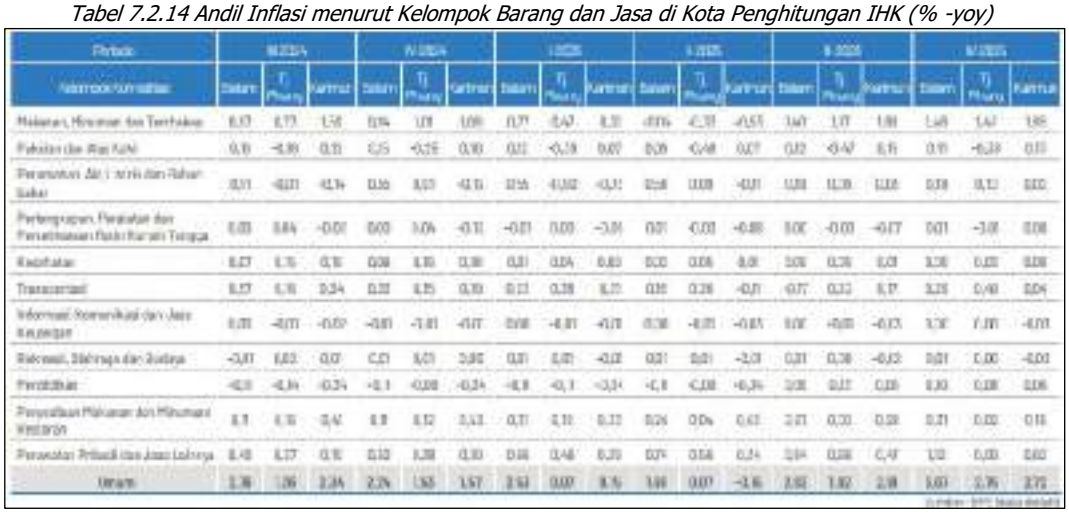
7.2.3.2.3. Inflasi Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun pada Triwulan IV 2025 mengalami inflasi sebesar 2,72% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,91% (yoy). Kondisi tersebut terutama didorong oleh inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang tercatat sebesar 4,42% (yoy) dengan andil 1,69% (yoy) sejalan dengan kenaikan harga komoditas pangan seperti cabai merah dengan andil 0,74% (yoy), cabai rawit dengan andil 0,35% (yoy), ikan mata besar dengan andil 0,12% (yoy), sigaret kretek mesin (SKM) dengan andil 0,10% (yoy), dan telur ayam ras dengan andil 0,09% (yoy). Selain itu, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga mengalami peningkatan inflasi menjadi 7,87% (yoy) dengan andil 0,62% (yoy) dipengaruhi kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan tren peningkatan harga emas global di tengah dinamika geopolitik yang masih berlanjut. Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran tercatat

inflasi sebesar 2,58% (yoy) dengan andil 0,18% (yoy), terutama disebabkan oleh kenaikan harga nasi dengan lauk dengan andil inflasi 0,08% (yoy). Lebih lanjut, Kelompok Pakaian dan Alas Kaki juga tercatat inflasi 2,79% (yoy) dengan andil 0,17% (yoy).

Tekanan inflasi pada Kabupaten Karimun secara bulanan tercatat sebesar 0,92% (mtm) terutama didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang tercatat inflasi sebesar 2,13% (mtm) dengan andil 0,81% (mtm). Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga komoditas pangan seperti cabai rawit dengan andil 0,36% (mtm), bawang merah dengan andil 0,18% (mtm), telur ayam ras dengan andil 0,07% (mtm), daging ayam ras dengan andil 0,05% (mtm), dan sawi hijau dengan andil 0,04% (mtm). Lebih lanjut, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya turut mengalami inflasi sebesar 1,01% (mtm) dengan andil 0,08% (mtm) utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga emas. Sementara itu, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan dengan penurunan harga pada Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya, Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga, Kelompok Kesehatan, Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya, serta Kelompok Transportasi.

Tabel 7.2.14 Andil Inflasi menurut Kelompok Barang dan Jasa di Kota Penghitungan IHK (% -yoy)



Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran tercatat inflasi sebesar 3,99% (yoy) dengan andil 0,28% (yoy), terutama disebabkan oleh kenaikan harga nasi dengan lauk dengan andil inflasi 0,18% (yoy), dan sate, ayam goreng, ketupat/lontong sayur, dan bakso siap santap yang masing-masing tercatat inflasi dengan andil 0,02% (yoy). Lebih lanjut, Kelompok Transportasi juga tercatat inflasi 1,41% (yoy) dengan andil 0,17% (yoy), lebih tinggi dan berbeda arah dari triwulan sebelumnya yang tercatat deflasi 0,93% (yoy) dengan andil 0,11% (yoy). Tekanan inflasi pada Kelompok Transportasi meningkat terutama disebabkan oleh kenaikan harga jasa angkutan penumpang yang dominan berasal dari komoditas tarif angkutan laut yang tercatat andil 0,12% (yoy).

7.2.3.3. Arah Perkembangan Inflasi

Inflasi Provinsi Kepri pada Triwulan I 2026 diprakirakan masih berada pada rentang kisaran sasaran inflasi 2025 yakni 2,5±1%, mempertimbangkan perkembangan sejumlah indikator harga. Tekanan inflasi pada Triwulan I 2026 diprakirakan berada di titik tengah sasaran inflasi nasional dipengaruhi oleh normalisasi pasokan pangan pasca

bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah sentra produksi serta diskon tarif angkutan udara dan laut pada periode HBKN. Di sisi lain, perlu diwaspadai risiko tekanan inflasi pada peningkatan harga emas perhiasan seiring peningkatan harga emas global di tengah tensi perang dagang yang masih berlanjut.

Berdasarkan realisasi inflasi hingga bulan Januari 2026, Kepri mengalami deflasi sebesar 0,09% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 1,14% (mtm).Sementara itu, inflasi secara tahunan tercatat sebesar 2,94% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 3,47% (yoy). Deflasi pada Januari 2026 terutama disebabkan oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami deflasi 1,31% (mtm) dengan andil sebesar -0,40% (mtm) sejalan dengan pulihnya pasokan komoditas pangan pasca bencana di sejumlah wilayah sentra produksi serta normalisasi permintaan pasca HBKN Nataru. Lebih lanjut, Kelompok Transportasi turut mengalami deflasi 0,43% (mtm) dengan andil 0,06% (mtm) dipengaruhi oleh penurunan tarif angkutan udara seiring berakhirnya lonjakan permintaan dan masih berlakunya diskon tarif periode Nataru hingga Januari 2026. Di sisi lain, deflasi bulanan yang lebih dalam tertahan oleh Inflasi pada komoditas emas perhiasan, beras, sewa rumah, daging ayam ras, dan ketimun. Peningkatan harga emas perhiasan sejalan dengan tren kenaikan harga emas global di tengah eskalasi ketegangan geopolitik. Sementara itu harga beras mengalami kenaikan didorong oleh kenaikan harga dari sentra produksi. Harga sewa rumah mengalami kenaikan seiring dengan penyesuaian tarif awal tahun dan peningkatan biaya termasuk penyesuaian upah. Sementara itu, harga daging ayam ras meningkat didorong oleh kenaikan biaya pakan ternak ditengah permintaan yang tetap terjaga. Adapun kenaikan harga ketimun didorong oleh terbatasnya pasokan.

Tekanan inflasi pada keseluruhan tahun diprakirakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan oleh *base effect* realisasi inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2025. Sejumlah risiko inflasi hingga akhir tahun 2026 yang dapat meningkatkan tekanan inflasi antara lain: (i) Potensi kenaikan harga beberapa komoditas pangan sebagai dampak berlanjutnya ketegangan geopolitik seperti kenaikan harga beras dan pupuk; (ii) Kebijakan pembatasan impor pangan yang perlu diimbangi dengan penguatan pasokan domestik agar tidak menimbulkan tekanan harga; (iii) Potensi berlanjutnya kenaikan harga komoditas emas seiring dengan ketidakpastian global; (iv) Risiko cuaca ekstrem atau anomali iklim yang berpotensi mengganggu produksi dan distribusi pangan sehingga meningkatkan volatilitas harga komoditas pangan; (v) Kenaikan UMR yang dapat mendukung perbaikan konsumsi masyarakat namun berpotensi memberikan tekanan dari sisi permintaan (demand pull) apabila ketersediaan pasokan tidak seimbang. Di sisi lain, faktor yang dapat menahan peningkatan inflasi antara lain: (i) Tekanan inflasi kelompok *administered price* yang diprakirakan terkendali sejalan dengan diskon tarif tiket angkutan udara pada periode-periode HBKN serta normalisasi tarif angkutan udara seiring penambahan jumlah armada, rute, dan frekuensi penerbangan; (ii) Ekspektasi inflasi tetap terkendali didukung oleh konsistensi bauran kebijakan; (iii) Berlanjutnya Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.

7.2.3.4. Upaya Pengendalian Inflasi

Sinergi antar instansi dan lembaga dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus ditingkatkan dan diperkuat sebagai upaya pengendalian inflasi di tengah peningkatan tekanan inflasi global dan dinamika pasokan domestik. Dengan mengacu pada peta jalan (*roadmap*) pengendalian inflasi daerah tahun 2025, berbagai upaya dilakukan termasuk mealui strategi implementasi kerangka 4K yaitu, memastikan Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Upaya pengendalian yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV 2025 antara lain:

a. Keterjangkauan Harga

1) Sinergi penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar di berbagai wilayah Provinsi Kepri hingga Desember 2025.
2) Pengendalian ekspektasi melalui sidak pasar rutin untuk stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.
3) Pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan dalam rangka HBKN Nataru.
4) Koordinasi penyelenggaraan Operasi Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah/Sembako Bersubsidi.

b. Ketersediaan Pasokan

1) Penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) eksisting baik antar maupun intra provinsi. Terdapat penambahaan 9 (sembilan) KAD baru dengan skema *Business-to-Business* untuk komoditas bawang merah, beras, dan cabai
2) Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan *Capacity Building* KAD dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Lampung, dan Maluku Utara.
3) Penguatan peran Asosiasi Distributor TPID Batam dalam penyediaan pasokan.
4) Penyaluran bantuan sarana dan prasarana pendukung produktivitas pangan untuk ketahanan pangan di daerah.

c. Kelancaran Distribusi

1) Penyaluran SPHP secara rutin di berbagai Kabupaten/Kota oleh BULOG.
2) Bazar Murah Rutin Kedai Pangan TPID Kab. Karimun.
3) Pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan dalam rangka Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah di Kepulauan Anambas, Tanjungpinang, dan Bintan.

d. Komunikasi Efektif

1) *High Level Meeting* TPID dan TP2DD, serta *High Level Meeting* Forkopimda Se-Provinsi Kepri.
2) Rapat Koordinasi *Dashboard* Pengendalian Inflasi Kabupaten Karimun.
3) Rapat Koordinasi Pasar Murah HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2025.
4) Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pasar Murah HBKN Ramadhan dan Idulftiri 2025.
5) *Launching* Kedai Pangan TPID Kabupaten Karimun.
6) *Capacity Building* TPID Se-Provinsi Kepri, termasuk *Capacity Building* dengan TPID Jawa Tengah.
7) Bincang Media dalam rangka pengendalian ekspektasi inflasi di masyarakat.

8) Rapat Koordinasi Pasar Murah HBKN Ramadhan dan Idulftiri 2025 Kota Batam.
9) Rapat Koordinasi Pasar Murah HBKN Idul Adha 2025.
10) Koordinasi pelaksanaan *Capacity Building* TPID dan KAD dengan daerah penghasil.
11) Penyediaan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali.
12) Telah dilaksanakan program komunikasi rutin dan insidentil. Berbagai program tersebut diantaranya siaran pers inflasi, talkshow radio, sidak, iklan layanan masyarakat, serta sosialisasi kepada masyarakat.
13) Pelatihan hilirisasi olahan cabai kepada Klaster/UMKM Binaan Bank Indonesia.
14) *High Level Meeting* dan Rapat Koordinasi Triwulan IV 2025.
15) Rapat Koordinasi Pasar Murah HBKN Nataru 2025.
16) Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pasar Murah HBKN Nataru 2025.

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah merancang dan melaksanakan sejumlah strategi untuk menghadapi tantangan inflasi ke depan, khususnya pada sektor pangan. Upaya pengendalian inflasi pangan tersebut ditempuh melalui implementasi 7 (tujuh) program unggulan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang mencakup peningkatan produktivitas, penguatan ketahanan komoditas pangan, optimalisasi kerja sama antar daerah, fasilitasi distribusi pangan, operasi pasar murah, digitalisasi data dan informasi, serta penguatan koordinasi dan komunikasi . Upaya ini diarahkan diantaranya melalui penguatan inovasi teknologi dan peningkatan kapasitas petani. Program tersebut mencakup pemanfaatan *Internet of Things (IoT)* dalam budidaya hidroponik, integrasi data pertanian untuk mendukung akurasi informasi produksi dan distribusi, serta penyelenggaraan kelas digital atau *smart agriculture* guna memperluas akses edukasi bagi petani terkait praktik budidaya pangan yang lebih produktif dan efisien.

Di sisi lain, penguatan pasokan dilakukan melalui pembentukan *command center* Kerja Sama Antar Daerah (KAD). *Command center* KAD berperan sebagai pusat informasi dan koordinasi kebijakan dalam menjembatani kebutuhan antara daerah surplus dan defisit pangan. Melalui penguatan *command center* tersebut, integrasi data stok dan neraca pangan antarwilayah akan dilakukan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pengendalian inflasi yang lebih terukur, responsif, dan tepat sasaran.

Selain itu, strategi ini juga didukung dengan penguatan infrastruktur dan efisiensi rantai pasok, sehingga distribusi barang dan jasa dapat berlangsung lebih lancar dan merata. Dengan kombinasi Langkah-langkah tersebut, diharapkan ketahanan pangan dan stabilitas harga di tingkat regional maupun nasional dapat terjaga, sekaligus memperkuat daya saing perekonomian di tengah dinamika global dan domestik yang penuh tantangan.

7.2.4. Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM



Intermediasi perbankan pada triwulan IV 2025 menunjukan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari akselerasi pertumbuhan kredit dan aset yang disertai dengan perbaikan kualitas kredit yang tercermin dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang lebih rendah. Adapun perlambatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengindikasikan pergeseran penempatan dana di perbankan dari simpanan ke konsumsi.

Kinerja perbankan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan IV 2025 membaik, tercermin dari pertumbuhan kredit yang tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya dan rasio NPL yang lebih rendah. Penyaluran kredit perbankan berdasarkan bank yang berlokasi di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 15,46% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 15,12% (yoy). Sementara itu, jumlah kredit yang disalurkan kepada proyek yang berlokasi di Kepri tumbuh sebesar 25,92% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 20,61% (yoy). Total aset perbankan di Kepri tercatat tumbuh sebesar 12,92% (yoy), lebih

tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 12,87% (yoy). Di sisi penghimpunan dana, DPK yang dihimpun oleh perbankan di Provinsi Kepri tumbuh sebesar 13,22% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,06% (yoy).

Kinerja intermediasi perbankan di Kepri tetap terjaga dan menunjukkan perbaikan. Berdasarkan proyek yang berlokasi di Kepri, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Kepri tercatat sebesar 96,87%, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 88,18%. Penyaluran kredit yang tumbuh positif turut didukung oleh membaiknya kualitas kredit, tercermin dari NPL gross yang tercatat sebesar 2,39%, mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,80%.

Kinerja penyaluran kredit UMKM juga meningkat dengan risiko kredit yang menurun. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 13,21% (yoy), mengalami akselerasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,96% (yoy). Akselerasi ini didorong oleh meningkatnya pertumbuhan kredit yang disalurkan ke LU Perantara Keuangan, yang pada triwulan sebelumnya tumbuh negatif sebesar 2,72% (yoy), menjadi tumbuh 55,00% (yoy) pada triwulan IV 2025. Selain itu, peningkatan juga didorong oleh sektor Konstruksi yang tercatat tumbuh sebesar 21,44% (yoy) pada triwulan IV 2025, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi 2,11% (yoy).

7.2.4.1. Perkembangan Kondisi Perbankan Provinsi Kepri

Penyaluran kredit perbankan untuk proyek yang berlokasi di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 25,92% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 20,61% (yoy). Akselerasi ini terutama disebabkan oleh penyaluran kredit pada LU Konstruksi serta LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi yang meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan laju penyaluran kredit sejalan dengan akselerasi kredit modal kerja dan kredit investasi.

Selanjutnya, aset perbankan tumbuh positif sebesar 12,92% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,87% (yoy). Di sisi lain, DPK tumbuh sebesar 13,22% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,06% (yoy). Perlambatan terutama terjadi pada tabungan dan deposito, sementara giro tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kemampuan pelaku usaha dalam membayar angsuran kredit tetap terjaga, tercermin dari tingkat kredit bermasalah (rasio NPL gross) yang tercatat sebesar 2,39%, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat 2,80% serta tetap di bawah ambang batas 5%.

Tabel 7.2.15 Perkembangan Indikator Utama Perbankan Kepri



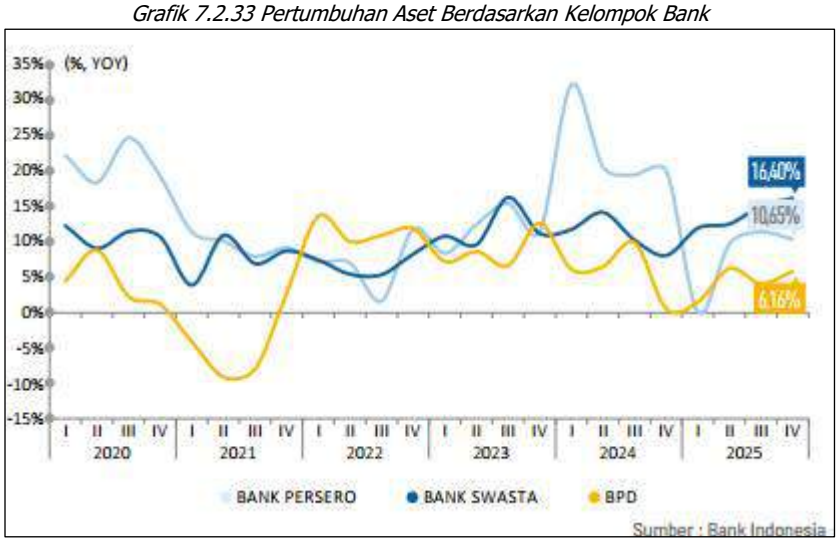
7.2.4.1.1. Perkembangan Aset Perbankan

Aset perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2025 berjumlah Rp118,94 triliun atau tumbuh 12,92% (yoy), mengalami akselerasi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 12,87% (yoy). Pertumbuhan aset bersumber dari kelompok Bank Swasta dan BPD yang tumbuh masing-masing sebesar 16,40% (yoy) dan 6,16% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,32% (yoy) dan 4,44% (yoy). Di sisi lain, aset kelompok Bank Persero mengalami deselerasi dengan tumbuh sebesar 10,65% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,64% (yoy). Secara keseluruhan, struktur aset perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2025 didominasi oleh kelompok Bank Persero yakni sebesar 48,85%, diikuti oleh Bank Swasta Nasional (45,53%), dan BPD (5,62%).

Grafik 7.2.32 Perkembangan Aset Perbankan



Grafik 7.2.33 Pertumbuhan Aset Berdasarkan Kelompok Bank



7.2.4.1.2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan

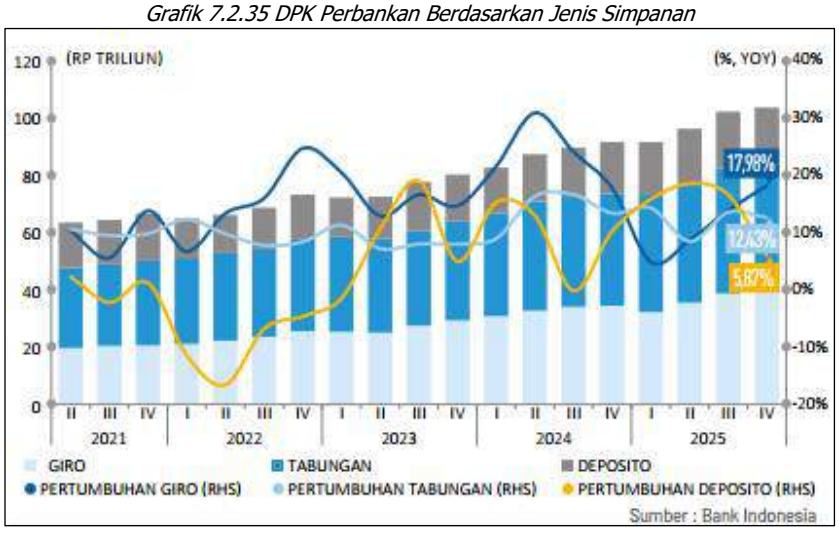
Pada triwulan IV 2025, total DPK di Kepri tercatat sebesar Rp103,11 triliun atau tumbuh 13,22% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 14,06%

(yoy). Perlambatan tersebut bersumber dari tabungan dan deposito yang masing-masing tumbuh sebesar 12,43% (yoy) dan 5,87% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 13,36% (yoy) dan 16,40% (yoy). Sementara itu, giro terakselerasi dengan tumbuh sebesar 17,98% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 13,66% (yoy). Struktur DPK pada triwulan IV 2025 masih didominasi tabungan dengan pangsa 42,37%, diikuti giro 39,20% dan deposito 18,43%. Pangsa instrumen giro yang relatif tinggi mengindikasikan preferensi masyarakat atau pelaku usaha untuk menjaga likuiditas yang optimal guna mendukung kelancaran transaksi operasional harian.

Grafik 7.2.34 Perkembangan DPK Perbankan



Grafik 7.2.35 DPK Perbankan Berdasarkan Jenis Simpanan



7.2.4.1.3. Perkembangan Kredit Perbankan

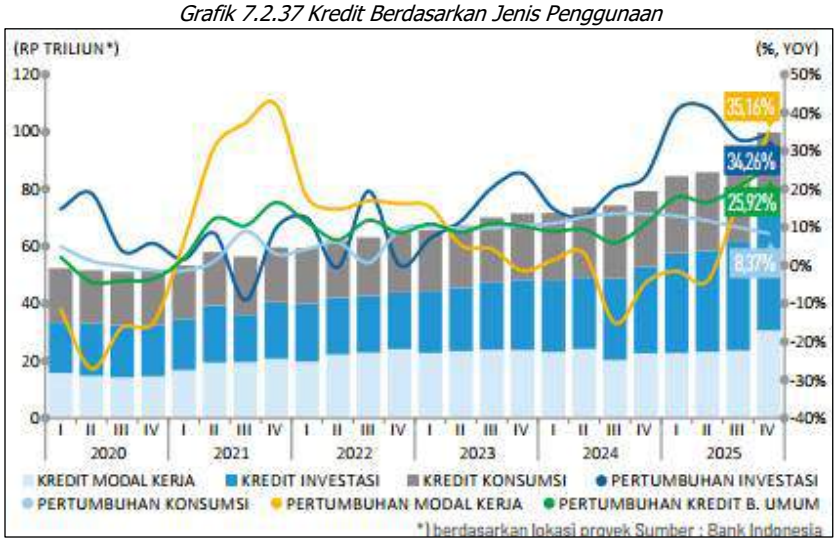
Jumlah penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek di wilayah Kepri pada triwulan IV 2025 sebesar Rp99,89 triliun atau tumbuh 25,92% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 20,61% (yoy). Peningkatan terutama didorong oleh akselerasi kredit modal kerja dan kredit investasi yang masing-

masing tumbuh sebesar 35,16% (yoy) dan 34,26% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 16,47% (yoy) dan 33,04% (yoy). Di sisi lain, kredit konsumsi mengalami perlambatan dengan tumbuh sebesar 8,37% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,96% (yoy). Secara keseluruhan, struktur kredit pada triwulan IV 2025 didominasi oleh kredit investasi dengan pangsa sebesar 40,73%, diikuti oleh kredit modal kerja 30,70% dan kredit konsumsi sebesar 28,57%.

Grafik 7.2.36 Perkembangan Kredit Perbankan



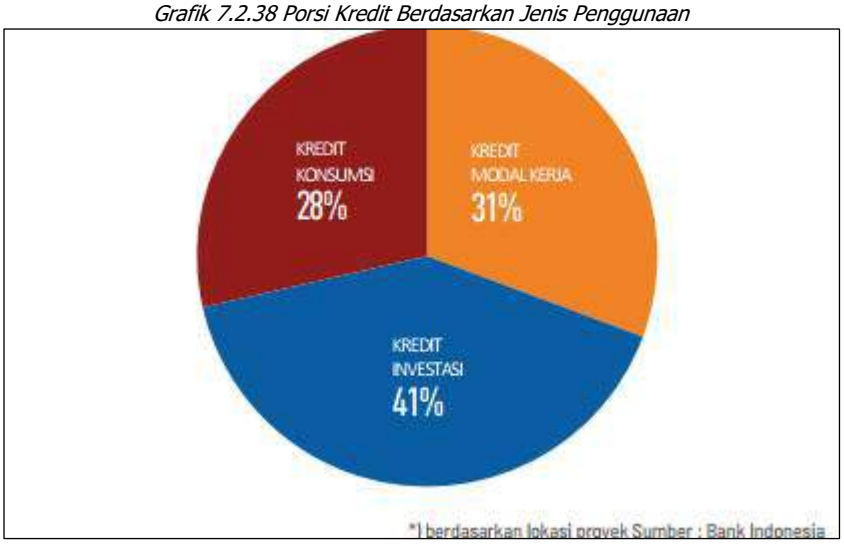
Grafik 7.2.37 Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan



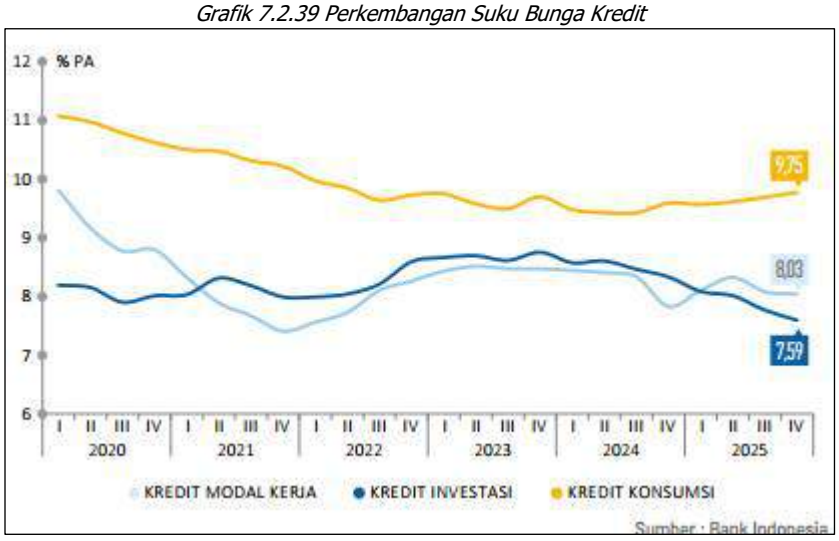
Pada triwulan IV 2025, rata-rata tingkat suku bunga kredit perbankan di Provinsi Kepri tercatat 8,34%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 8,44%. Penurunan suku bunga terjadi pada kredit modal kerja dan kredit investasi yang masing-masing tercatat sebesar 8,03% dan 7,59%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,07% dan 7,76%. Di sisi lain, suku bunga kredit konsumsi mengalami peningkatan menjadi 9,75%, setelah sebelumnya tercatat sebesar 9,67% pada triwulan III 2025. Di samping itu, suku bunga simpanan (DPK) juga cenderung menurun. Suku bunga giro pada triwulan laporan sebesar 1,87%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang

tercatat 1,92%, sejalan dengan suku bunga deposito yang turun menjadi 3,90% dari triwulan sebelumnya yang tercatat 4,24%. Adapun suku bunga tabungan turut mengalami penurunan menjadi 0,60%, setelah sebelumnya tercatat sebesar 0,71% pada triwulan III 2025.

Grafik 7.2.38 Porsi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

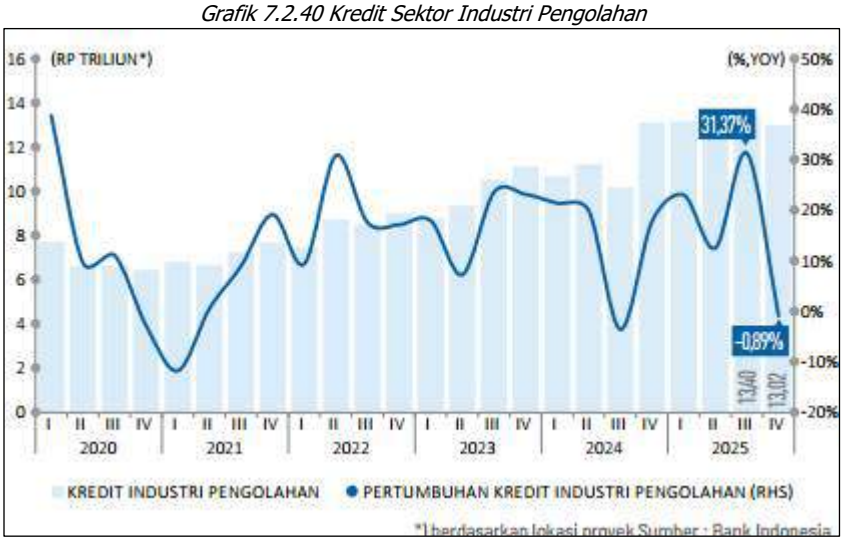


Grafik 7.2.39 Perkembangan Suku Bunga Kredit

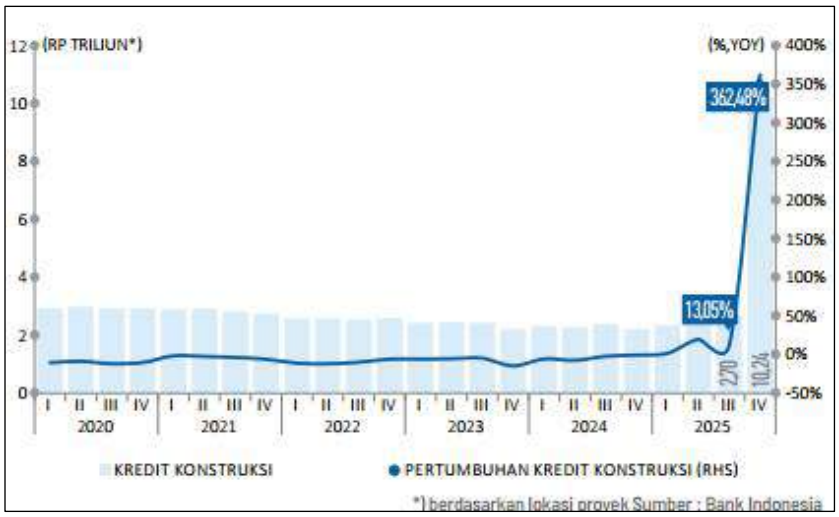


Secara sektoral, peningkatan penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek terutama didorong oleh kredit LU Konstruksi yang tumbuh 349,43% (yoy), mengalami akselerasi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 13,05% (yoy). LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi juga mengalami akselerasi dari 31,55% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 43,84% (yoy) pada triwulan IV 2025. LU Pertambangan dan Penggalian juga menujukkan perbaikan, meskipun masih mengalami kontraksi sebesar 18,51% (yoy), membaik dibandingkan triwulan III 2025 yang terkontraksi 26,95% (yoy). Lebih lanjut, LU *Real Estate*, Sewa dan Jasa PT serta LU Perdagangan Besar dan Eceran juga mengalami akselerasi dengan masing-masing tumbuh 58,77% (yoy) dan 6,11% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 55,84% (yoy) dan 5,72% (yoy).

Grafik 7.2.40 Kredit Sektor Industri Pengolahan



Grafik 7.2.41 Kredit Konstruksi



Peningkatan yang lebih tinggi pada triwulan IV 2025 tertahan oleh perlambatan kredit di beberapa sektor di antaranya LU Industri Pengolahan yang terkontraksi sebesar 0,89% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 31,37% (yoy). Selain itu, LU Listrik, Gas, dan Air juga mengalami perlambatan dengan tumbuh sebesar 57,19% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 62,03% (yoy).

Secara spasial, penyaluran kredit di wilayah Kepri masih terkonsentrasi di Kota Batam dengan jumlah kredit pada triwulan IV 2025 sebesar Rp79,63 triliun atau setara dengan pangsa 79,72% dari total kredit diKepri. Kondisi tersebut sejalan dengan peran Kota Batam sebagai pusat ekonomi di Provinsi Kepri yang memiliki pangsa > 60% dalam PDRB Kepri. Penyaluran kredit terbesar kedua berlokasi di Kota Tanjungpinang dengan pangsa 7,84% dari total kredit atau sebesar Rp7,83 triliun, diikuti Kabupaten Karimun dengan pangsa 4,71% dari total kredit atau sebesar Rp4,70 triliun dan Kabupaten Bintan dengan pangsa 4,67% dari total kredit atau sebesar Rp4,67 triliun.

Tabel 7.2.16 Penyaluran Kredit (Spasial)

Kabupaten/Kota	Triwulan IV 2025	
	Kredit (Rp Triliun*)	Porsi (%)
Kota Batam	79,63	79,72%
Kota Tanjungpinang	7,83	7,84%
Kab. Karimun	4,70	4,71%
Kab. Lingga	0,84	0,84%
Kab. Natuna	1,84	1,84%
Kab. Bintan	4,67	4,67%
Kab. Kep. Anambas	0,38	0,38%
Total	**99,89**	**100,00%**

Sumber: Bank Indonesia
*)Berdasarkan lokasi proyek

7.2.4.1.4. Intermediasi dan Resiko Kredit Perbankan

Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Kepri yang tercermin dari rasio LDR berdasarkan lokasi proyek pada triwulan IV 2025 mengalami peningkatan menjadi 96,87%, setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 88,18%. Peningkatan LDR tersebut diikuti dengan perbaikan kualitas kredit atau NPL yang mencatatkan angka 2,39%, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat 2,80%. Tingkat NPL tersebut masih berada dalam batas risiko yang relatif aman dan masih berada di bawah ambang batas (*threshold*) 5%.

Grafik 7.2.42 Intermediasi dan Risiko Perbankan Kepri



7.2.4.2. Asesmen Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Pembiayaan pada sektor korporasi, rumah tangga, dan UMKM mengalami akselerasi pada triwulan IV 2025. Pekembangan ini menunjukkan fungsi intermediasi perbankan yang tetap terjaga seiring meningkatnya aktivitas ekonomi.

7.2.4.2.1. Ketahanan Sektor Korporasi

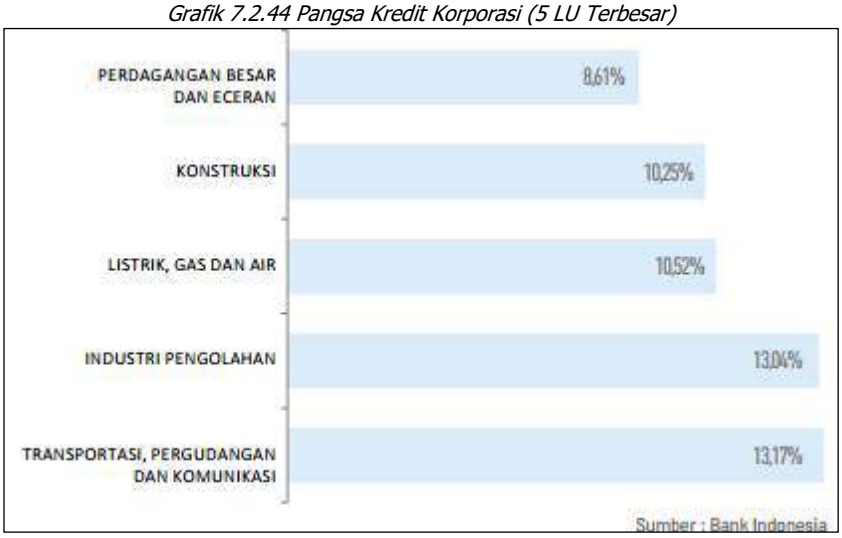
Kinerja penyaluran kredit ke sektor korporasi mengalami akselerasi pada triwulan IV 2025. Penyaluran kredit korporasi (lokasi proyek) berjumlah Rp56,64 triliun atau tumbuh 37,00% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 26,37% (yoy). Sejalan dengan penguatan kredit, risiko kredit korporasi juga mengalami perbaikan ditandai dengan NPL kredit korporasi yang menurun menjadi 3,01%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat 3,70%.

Pangsa penyaluran kredit ke sektor korporasi didominasi oleh LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi dengan pangsa sebesar 13,17% dari total kredit. Pangsa penyaluran kredit selanjutnya diikuti oleh LU Industri Pengolahan (13,04%), LU Listrik, Gas, dan Air (10,52%) LU Konstruksi (10,25%), serta LU Perdagangan Besar dan Eceran (8,61%). Sementara, pangsa LU lainnya pada triwulan IV 2025 masih < 8%.

Grafik 7.2.43 Perkembangan Kredit Korporasi



Grafik 7.2.44 Pangsa Kredit Korporasi (5 LU Terbesar)

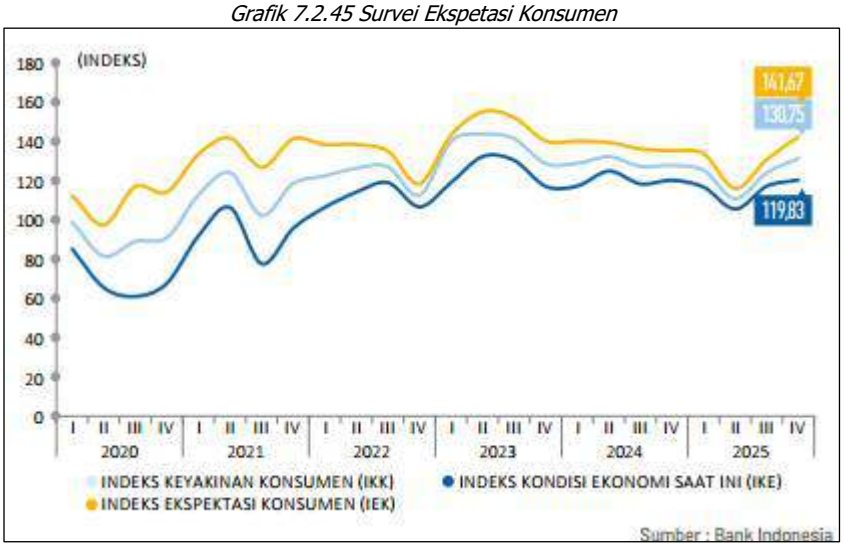


7.2.4.2.2. Ketahanan Sektor Rumah Tangga

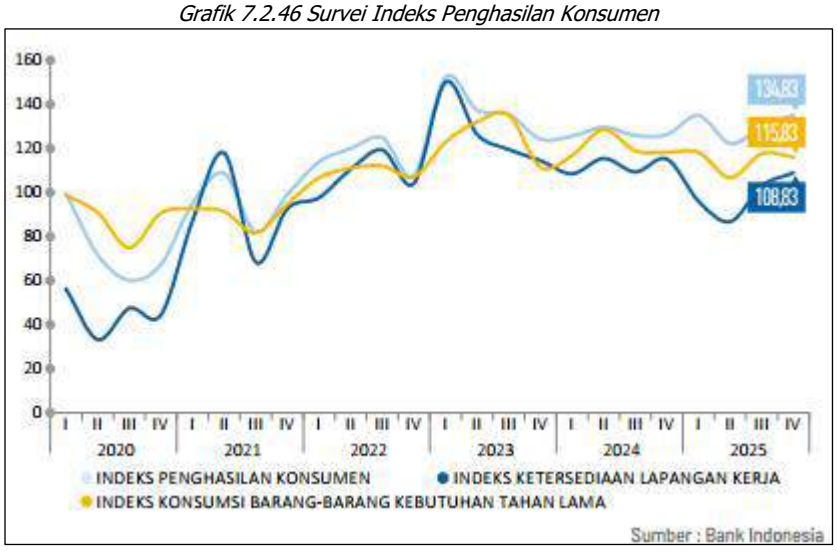
Ketahanan sektor rumah tangga mengalami peningkatan sejalan dengan terakselerasinya penyaluran kredit rumah tangga. Hal tersebut sejalan dengan hasil survei triwulanan menunjukkan peningkatan pada rata-rata indeks pada triwulan IV 2025. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) menunjukkan peningkatan dari yang sebelumnya tercatat sebesar 123,50; 116,67; dan 130,33 menjadi 130,75; 119,83; dan 141,67 pada triwulan IV 2025.

Lebih lanjut, Indeks Penghasilan Konsumen tercatat mengalami peningkatan pada triwulan IV 2025 menjadi sebesar 134,83 dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 129,67. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia mengindikasikankeyakinan konsumen terjaga pada level optimis (>100), yang mencerminkan persepsi kondisi ekonomi yang membaik sekaligus ekspektasi yang lebih kuat kedepan.

Grafik 7.2.45 Survei Ekspetasi Konsumen



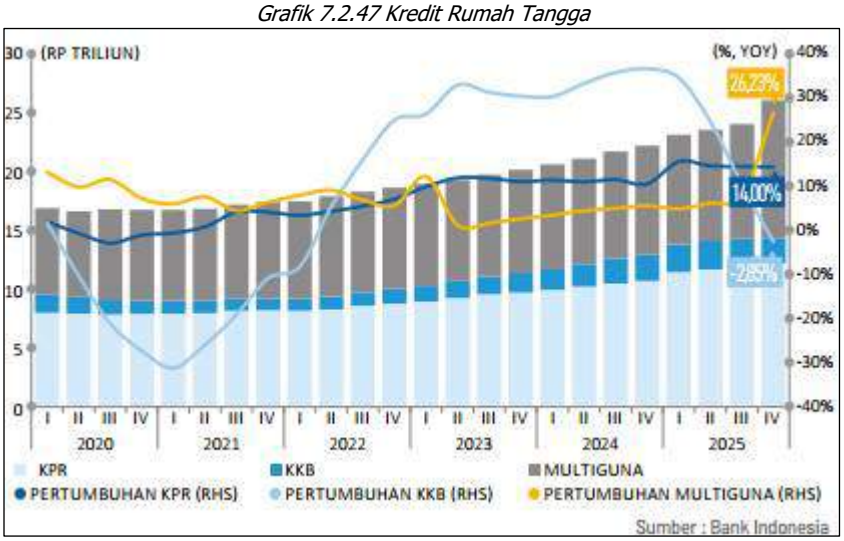
Grafik 7.2.46 Survei Indeks Penghasilan Konsumen



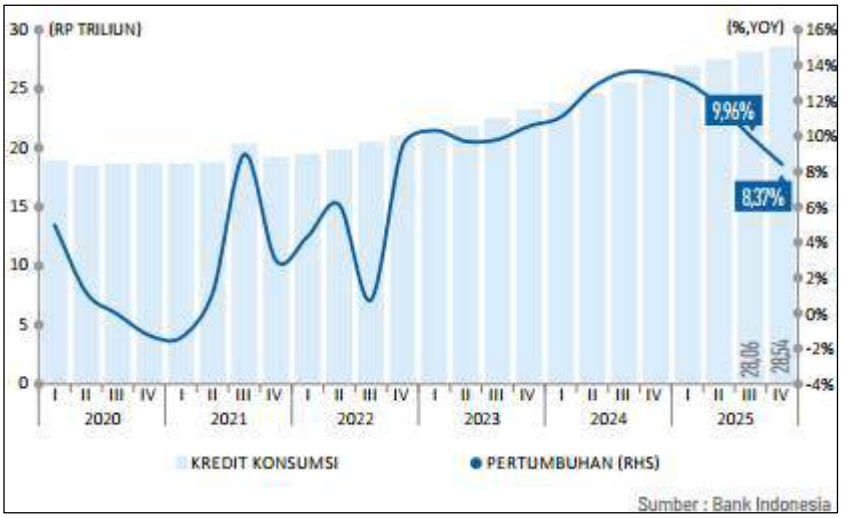
Di tengah penguatan keyakinan konsumen, penyaluran kredit rumah tangga juga meningkat. Kredit Rumah Tangga tumbuh sebesar 14,82% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,00% (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh kredit multiguna yang pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 26,23% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 6,99% (yoy). Sementara itu, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) mengalami deselerasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 14,12% (yoy) dan 10,04% (yoy) menjadi 14,00% (yoy) dan terkontraksi 2,85% (yoy) pada triwulan IV 2025.

Jumlah DPK milik perseorangan pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 5,35% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,14% (yoy). Akselerasi tersebut didorong oleh membaiknya kinerja giro dan deposito yang masing-masing terkontraksi sebesar 10,90% (yoy) dan 0,97% (yoy), lebih dangkal dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi masing-masing 28,57% (yoy), dan 7,70% (yoy) pada triwulan III 2025.

Grafik 7.2.47 Kredit Rumah Tangga



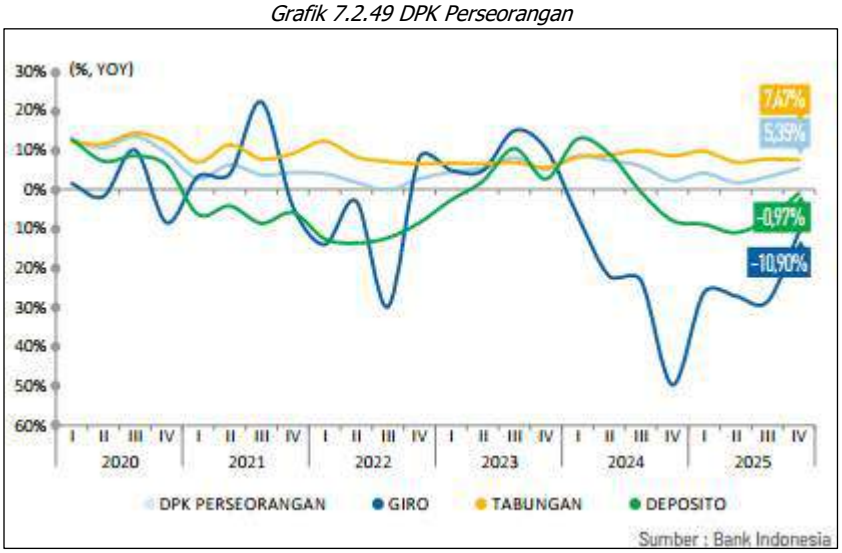
Grafik 7.2.48 Kredit Konsumsi



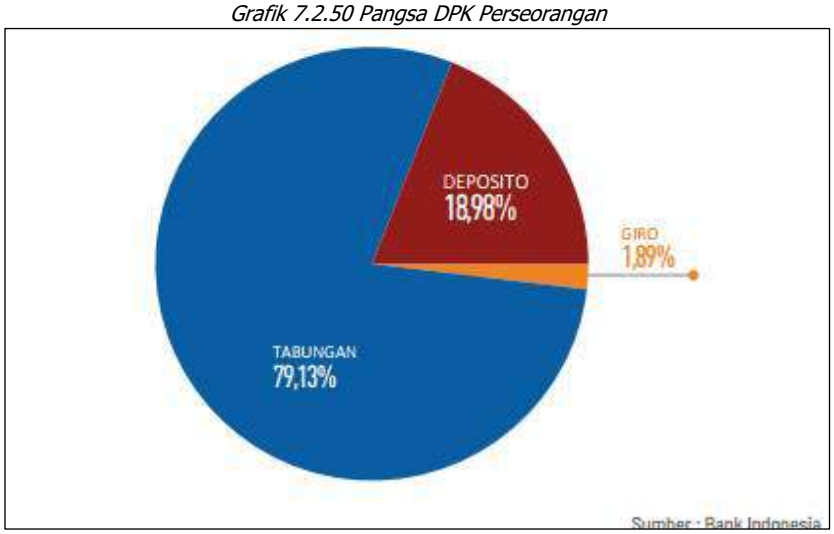
Secara umum, pertumbuhan DPK yang meningkat turut ditopang oleh tabungan yang tetap tumbuh 7,47% (yoy) dimana struktur tabungan masih mendominasi pangsa DPK perseorangan dengan pangsa 79,13%, diikuti deposito 18,98% dan giro 1,89%. Tingginya pangsa tabungan terhadap total DPK perseorangan menunjukkan kecenderungan preferensi masyarakat untuk menyimpan dana pada instrumen yang lebih likuid.

Dari sisi risiko kredit, NPL kredit rumah tangga pada triwulan IV 2025 tercatat menurun dan masih berada di bawah *threshold* 5%. NPL kredit rumah tangga tersebut menurun menjadi 1,80% dari sebelumnya sebesar 2,00% pada triwulan III 2025. Penurunan NPL terjadi pada kategori KPR dari 2,32% menjadi 2,03%, kredit multiguna dari 1,63% menjadi 1,38%, serta kredit lainnya dari 1,55% menjadi 1,53%. Sementara NPL KKB dan kredit peralatan rumah tangga tercatat mengalami peningkatan dengan nilai 1,14% dan 3,43%, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat 1,10% dan 3,35%.

Grafik 7.2.49 DPK Perseorangan



Grafik 7.2.50 Pangsa DPK Perseorangan



Tabel 7.2.17 Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga



7.2.4.2.3. Ketahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

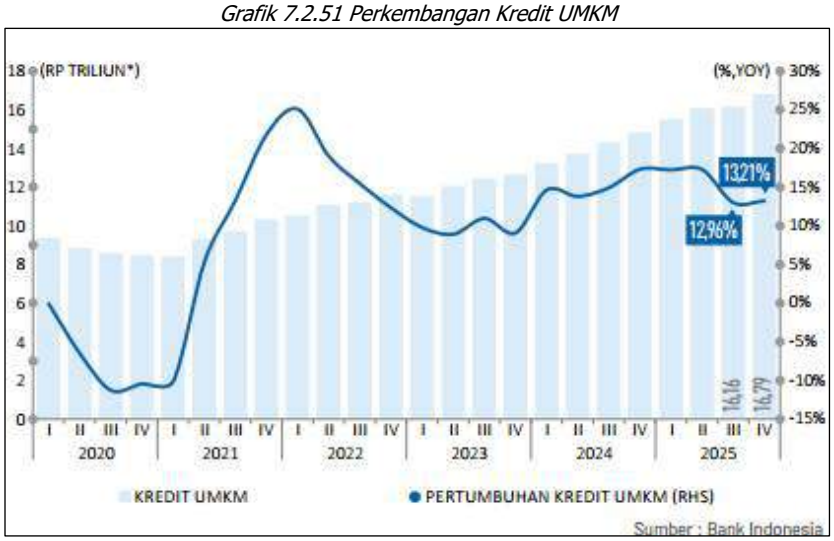
Penyaluran kredit UMKM (lokasi proyek) pada triwulan IV 2025 terakselerasi disertai penurunan risiko kredit. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 13,21% (yoy), mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,96% (yoy). Di sisi lain, risiko kredit mengalami penurunan, tecermin dari rasio NPL kredit UMKM yang pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 3,37% menjadi 3,04%.

Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit tercatat sebesar 16,81%, menurun dari triwulan sebelumnya sebesar 18,02%. Meski demikian, pangsa kredit UMKM terhadap total kredit di Kepri tersebut masih mendekati 20% sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan lapangan usaha, penyaluran kredit UMKM masih ditopang oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, serta LU Industri Pengolahan dengan pangsa masing-masing sebesar 35,80%, 20,66%, dan 7,93%.

Penyaluran kredit UMKM yang terakselerasi didorong oleh meningkatnya kredit pada LU Perantara Keuangan, LU Konstruksi, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran yang masing-masing tumbuh 55,00% (yoy), 21,44% (yoy), dan 4,91% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh -2,72% (yoy), -2,11% (yoy), dan 4,24% (yoy).

Dalam rangka mendukung penguatan UMKM di Provinsi Kepri, Pemerintah berperan dalam penyaluran pembiayaan mikro dan ultra mikro oleh perbankan, melalui subsidi bunga pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Bank Indonesia turut berperan antara lain dengan mendorong pengembangan UMKM melalui kebijakan kewajiban bank untuk memenuhi secara bertahap Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Pembiayaan inklusif merupakan penyediaan dana yang diberikan bank untuk UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR) dalam Rupiah dan valuta asing. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri juga terus mendorong UMKM agar dapat terus bertumbuh dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital antara lain melalui dukungan dalam penyelenggaraan pameran, kurasi produk, pelatihan, dan business matching terhadap para pelaku usaha UMKM yang dilakukan secara berkelanjutan.

Grafik 7.2.51 Perkembangan Kredit UMKM



7.2.5. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah



Sejalan dengan perningkatan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tetap tumbuh positif dan mengalami akselerasi pada triwulan IV 2025. Selain itu, transaksi pembayaran non-tunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital.

Aktivitas transaksi pembayaran tunai pada triwulan IV 2025 mencatatkan *net outflow* sebesar Rp3,03 Triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yangsebesar Rp2,21 Triliun. Lebih lanjut, transaksi QRIS dan Uang Elektronik (UE) juga meningkat. Kondisi ini mencerminkan preferensi dan akseptasi masyarakat terhadap transaksi nontunai yang semakin menguat, didukung kemudahan akses layanan pembayaran nontunai. Peningkatan aktivitas sistem pembayaran tersebut sejalan dengan pertumbuhan positif pada kinerja ekonomi Kepri yang tumbuh 7,89% (yoy) pada triwulan IV 2025, terakselerasi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 7,48% (yoy).

7.2.5.1. Transaksi Pembayaran Tunai

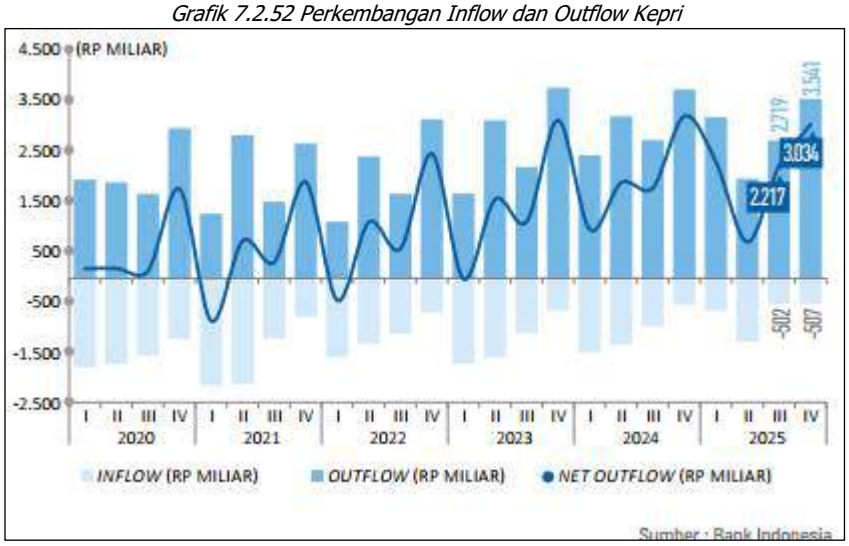
7.2.5.1.1. Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (*inflow*[1]/*outflow*[2])

Pada triwulan IV 2025, pergerakan aliran uang kartal di Kepri tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp3,03 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat *net outflow* sebesar Rp2,21 triliun. Secara rinci, jumlah aliran uang kartal yang keluar (*outflow*) pada triwulan IV 2025 mencapai Rp3,54 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 sebesar Rp2,71 triliun. Pada saat yang sama, aliran uang kartal yang masuk (*inflow*) tercatat sebesar Rp507 miliar, sedikit lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp502 miliar. Peningkatan *net outflow* mengindikasikan kebutuhan uang tunai masyarakat yang meningkat sejalan dengan kinerja perekonomian Kepri yang tetap tumbuh positif dan mendukung perputaran aktivitas ekenomi. Adapun kondisi tersebut turut mencerminkan perekonomian daerah yang masih kuat di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Faktor pendorong tetap kuatnya perekonomian di Kepri antara lain kinerja lapangan usaha utama di Kepri yaitu industri pengolahan yang tumbuh 8,89% (yoy), pertambangan dan penggalian yang tumbuh 18,67% (yoy), konstruksi yang tumbuh 4,11% (yoy), serta perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 7,57% (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan juga didukung oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), konsumsi rumah tangga, serta konsumsi pemerintah yang tetap terjaga.

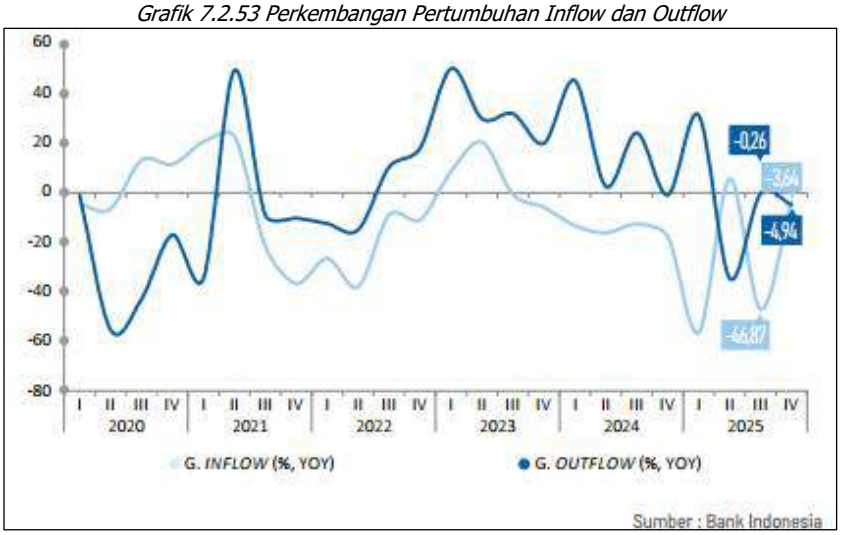
Untuk memastikan ketersediaan uang tunai di Provinsi Kepri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat mengoperasikan kas titipan di tiga lokasi, yaitu Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Karimun. Selain itu, layanan kas keliling dilakukan di wilayah perkotaan dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, Terpencil) guna menjamin distribusi Rupiah yang layak edar. Pada 2025, Bank Indonesia juga mengadakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) ke beberapa pulau antara lain Pulau Singkep, Pulau Tambelan, Pulau Subi Besar, Pulau Midai, dan Pulau Tarempa.

[1] *Inflow:* aliran uang masuk ke Bank Indonesia melalui setoran Bank
[2] *Outflow:* aliran uang keluar dari Bank Indonesia melalui penarikan Bank

Grafik 7.2.52 Perkembangan Inflow dan Outflow Kepri



Grafik 7.2.53 Perkembangan Pertumbuhan Inflow dan Outflow



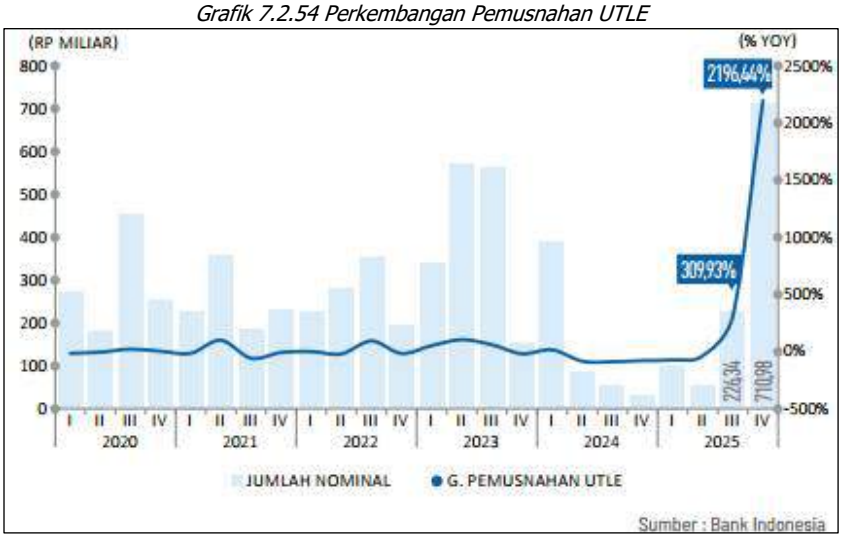
7.2.5.1.2. Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

Bank Indonesia berperan menyediakan uang kartal layak edar dalam rangka menjaga kualitas uang dalam peredaran. Proses penyediaannya mencakup penerbitan uang yang berkualitas, pengelolaan jumlah uang beredar, edukasi masyarakat melalui program Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah, layanan kas keliling, serta pemeliharaan kualitas uang layak edar. Dalam rangka memelihara kualitas uang di masyarakat, Bank Indonesia menjalankan *Clean Money Policy* melalui pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang berasal dari penukaran oleh masyarakat maupun setoran perbankan.

Jumlah UTLE yang dimusnahkan pada triwulan IV 2025 tercatat sebanyak Rp710 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berjumlah Rp226 miliar. Pemusnahan mencakup uang yang rusak atau tidak memenuhi standar kelayakan edar. Peningkatan pemusnahan UTLE terutama didorong oleh meningkatnya *outflow* atau kebutuhan uang tunai pada periode HBKN Nataru yang jatuh pada triwulan IV 2025. Bank Indonesia terus berupaya untuk menjaga kualitas peredaran uang sejalan dengan masifnya

kampanye nasional CBP Rupiah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam merawat uang Rupiah di Kepri. Selain itu, edukasi tentang uang Rupiah kini telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah sejak tahun 2024.

Grafik 7.2.54 Perkembangan Pemusnahan UTLE



7.2.5.1.3. Upaya Menekan Peredaran Uang Palsu (UPAL)

Dalam rangka meningkatkan rasa cinta, bangga, dan paham terhadap Rupiah, berbagai kegiatan edukasi CBP Rupiah terus dilakukan kepada masyarakat melalui sosialisasi di beragam kanal. Kegiatan tersebut bertujuan mengenalkan ciri keaslian uang Rupiah, menumbuhkan kecintaan pada Rupiah dan membangkitkan kebanggaan menggunakan Rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara.

Melalui edukasi CBP Rupiah, pemahaman masyarakat dalam mengenali ciri keaslian uang Rupiah diharapkan semakin meningkat sehingga dapat menekan peredaran uang palsu. Selama triwulan IV 2025 terdapat 378 lembar temuan uang palsu (UPAL) di wilayah Kepri, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebanyak 881 lembar. Bank Indonesia secara konsisten mendorong edukasi CBP Rupiah termasuk diseminasi mengenai risiko dan konsekuensi hukum bagi pelaku peredaran uang palsu. Apabila masyarakat menemukan uang Rupiah yang diragukan keasliannya, masyarakat dapat meminta klarifikasi ke kantor Bank Indonesia terdekat dan dihimbau untuk melaporkan temuan tersebut dengan menyertakan fisik uang melalui bank atau kepada kepolisian. Laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia, baik secara langsung atau melalui perbankan, akan diteliti lebih lanjut. Jika berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia uang tersebut dinyatakan tidak asli, masyarakat dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Grafik 7.2.55 Perkembangan Temuan Uang Palsu

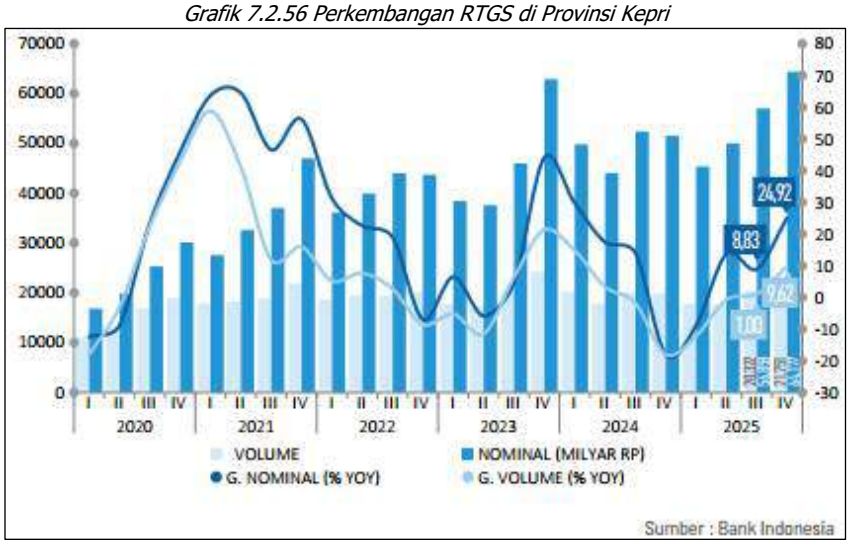


7.2.5.2. Transaksi Pembayaran Non Tunai

7.2.5.2.1. Transaksi Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* (RTGS)

Nominal transaksi sistem Bank Indonesia *Real-Time Gross Settlement* (RTGS) tumbuh meningkat pada triwulan IV 2025. Nominal transaksi BI-RTGS di Kepri pada triwulan IV 2025 tercatat mencapai Rp64,17 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp56,85 triliun. Secara tahunan, nominal transaksi RTGS pada triwulan IV tumbuh sebesar 24,92% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,83% (yoy). Lebih lanjut, volume transaksi pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 9,62% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 1,00% (yoy). Tren peningkatan transaksi RTGS mengindikasikan menguatnya aktivitas ekonomi dan transaksi bernilai besar pada triwulan berjalan.

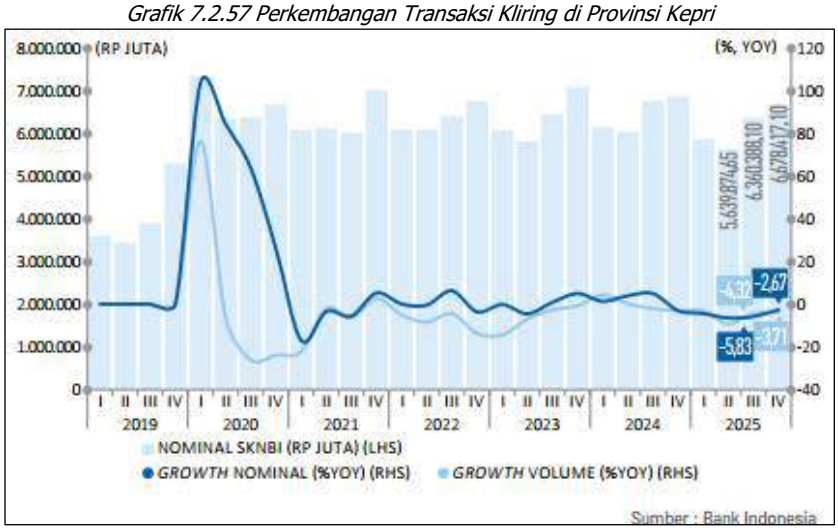
Grafik 7.2.56 Perkembangan RTGS di Provinsi Kepri



7.2.5.2.2. Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Pada saat yang sama, nominal transaksi kliring melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) selama triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp6,67 triliun, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp6,36 triliun. Namun secara tahunan, pertumbuhan nominal transaksi SKNBI pada triwulan IV 2025 masih terkontraksi sebesar 2,67% (yoy), membaik dibandingkan triwulan III 2025 yang terkontraksi 5,83% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan volume transaksi terkontraksi 3,71% (yoy) pada triwulan IV 2025, juga lebih baik dibandingkan triwulan III 2025 yang terkontraksi sebesar 4,32% (yoy). Kontraksi ini mengindikasikan bahwa preferensi masyarakat memilih menggunakan layanan SKNBI untuk transaksi cenderung menurun di tengah semakin beragamnya pilihan layanan jasa transfer untuk bertransaksi. Saat ini, selain BI RTGS dan SKNBI, tersedia BI-FAST yang menyediakan layanan transfer 24/7 dan QRIS dengan lebih banyak kemudahan akses untuk berbagai transaksi.

Grafik 7.2.57 Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Kepri



7.2.5.2.3. Alat Pembayaran menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE)

Transaksi menggunakan kartu debit pada triwulan IV 2025 menunjukan perbaikan dari sisi volume. Volume transaksi terkontraksi sebesar 4,07% (yoy), namun membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 5,13% (yoy). Sementara itu, nominal transaksi mengalami perlambatan dengan terkontraksi sebesar 2,87% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 67,86% (yoy).

Di sisi lain, transaksi menggunakan kartu kredit pada triwulan IV 2025 mengalami akselerasi. Volume transaksi tumbuh 66,95% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 21,41% (yoy). Nominal transaksi juga menguat dari 14,21% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 62,52% (yoy) pada triwulan IV 2025. Pertumbuhan volume dan nominal kartu kredit yang tinggi masih mengindikasikan bahwa konsumsi tetap tumbuh didukung oleh kredit/pembiayaan perbankan.

Grafik 7.2.58 Perkembangan Transaksi Kartu Debit

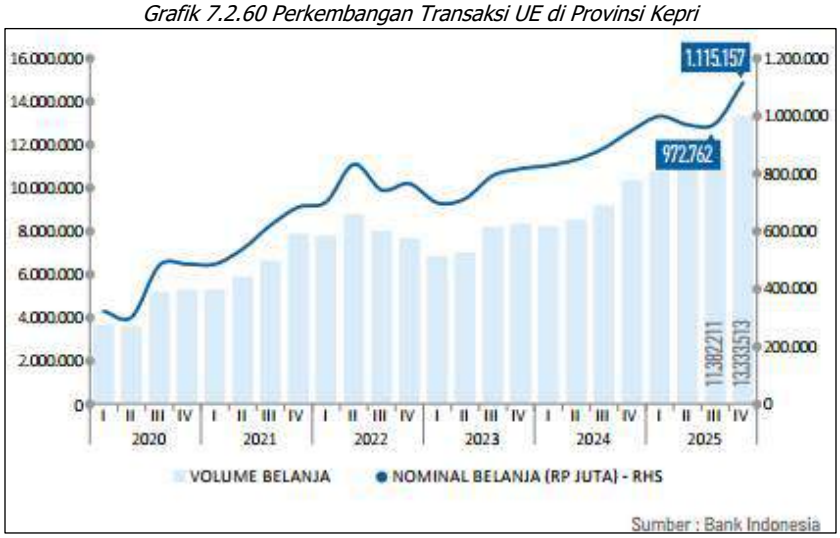


Grafik 7.2.59 Perkembangan Transaksi Kartu Kredit



Nilai transaksi UE di Kepri pada triwulan IV 2025 tercatat Rp1,11 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 sebesar Rp972,76 miliar. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan volume belanja yang mengalami peningkatan dari 11,38 juta transaksi menjadi 13,33 juta transaksi pada triwulan IV 2025. Kinerja ini mencerminkan meningkatnya aktivitas pembayaran digital seiring dengan kinerja perekonomian Kepri yang tumbuh positif. Untuk terus mendorong transaksi nontunai, Bank Indonesia memperkuat perluasan akseptasi pembayaran digital, khususnya melalui QRIS.

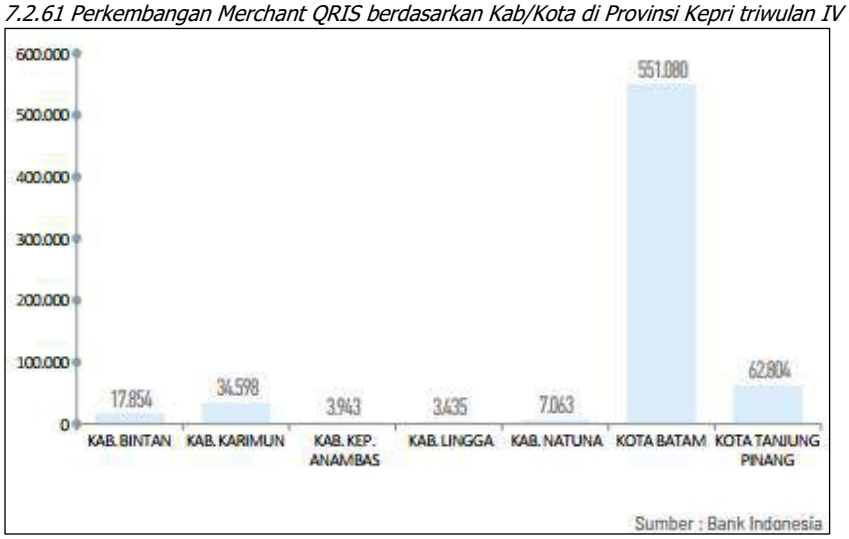
Grafik 7.2.60 Perkembangan Transaksi UE di Provinsi Kepri



7.2.5.2.4. Perkembangan QRIS

Implementasi QRIS di Kepri tumbuh secara signifikan dan diharapkan dapat mendukung sistem pembayaran yang aman, lancar dan handal serta turut mendorong inklusi keuangan khususnya pada UMKM. Dari sisi user/pengguna, pada triwulan IV 2025 tercatat penambahan sebanyak 11.308 pengguna baru atau tumbuh sebesar 2,05% (qtq), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang tumbuh 1,51% (qtq). Dengan demikian, total pengguna QRIS di Kepri hingga triwulan IV 2025 telah mencapai 564.088 pengguna. Dari sisi transaksi, pada triwulan IV 2025 tercatat34.506.027 transaksi, atau terkontraksi sebesar 3,20% (qtq), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 118,97% (qtq). Nominal transaksi QRIS di Kepri pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp3,83 triliun atau tumbuh sebesar 6,49% (qtq).

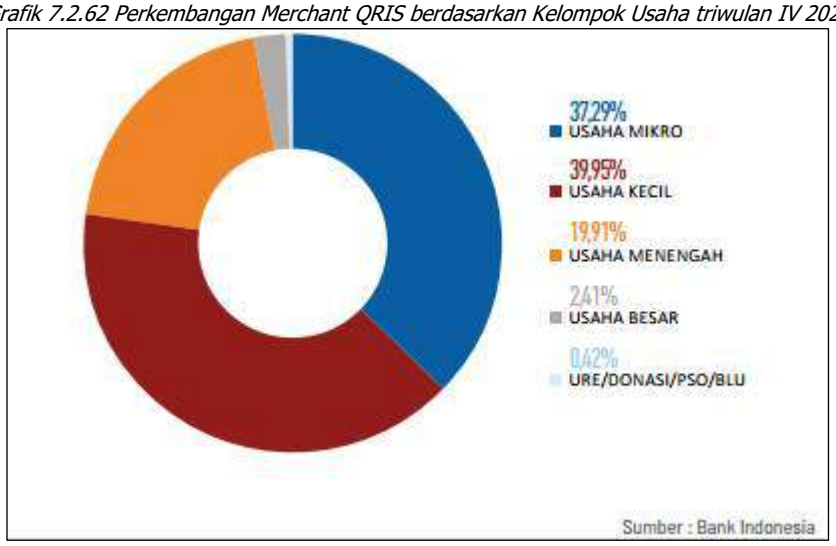
Grafik 7.2.61 Perkembangan Merchant QRIS berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepri triwulan IV 2025



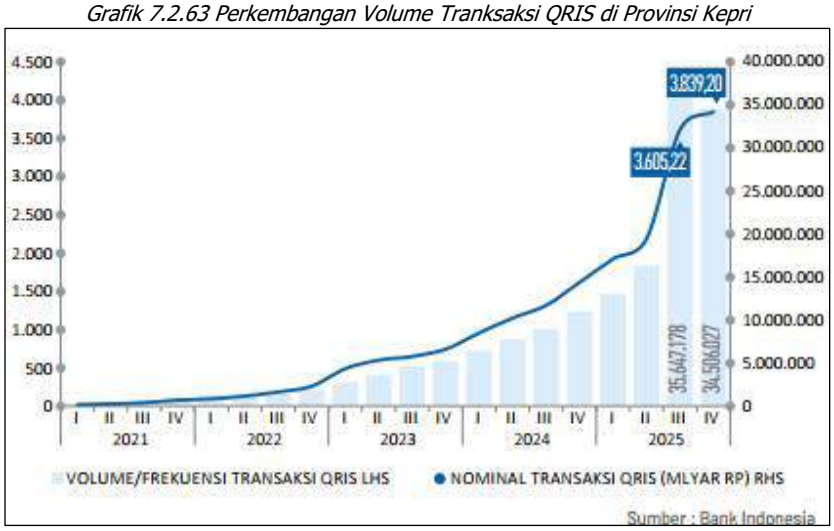
Hingga triwulan IV 2025, jumlah merchant QRIS tercatat sebesar 680.777 *merchant*, atau tumbuh 17,53% (yoy), melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 18,14% (yoy). Mayoritas merchant berlokasi di Kota Batam (80,95%), diikuti oleh Kota Tanjungpinang (9,23%) dan Kab. Karimun (5,08%). *Merchant* QRIS di Kepri

didominasi oleh kategori Usaha Kecil dengan pangsa sebesar 39,95%, kategori Usaha Mikro dengan pangsa sebesar 37,29%, dan Usaha Menengah sebesar 19,91%. Berdasarkan hal tersebut, sebanyak 97,16% *merchant* QRIS di Kepri termasuk dalam kategori UMKM.

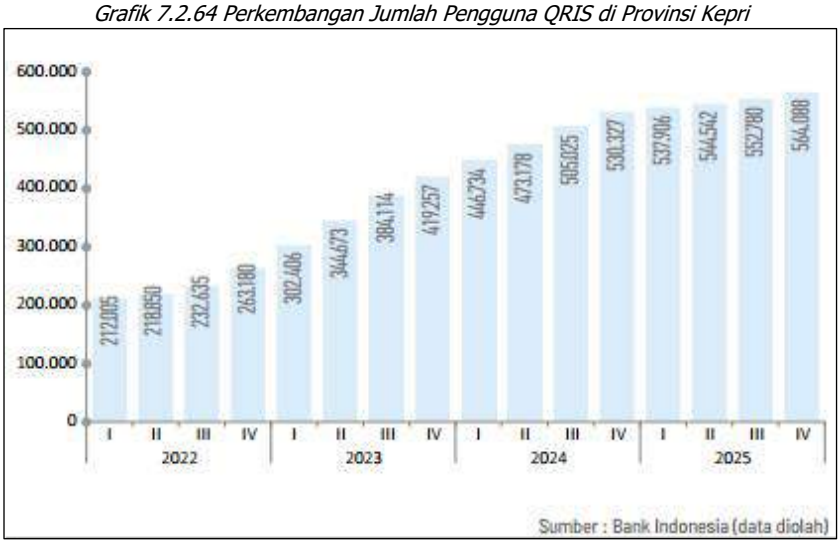
Grafik 7.2.62 Perkembangan Merchant QRIS berdasarkan Kelompok Usaha triwulan IV 2025



Grafik 7.2.63 Perkembangan Volume Tranksaksi QRIS di Provinsi Kepri



Grafik 7.2.64 Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS di Provinsi Kepri



7.2.5.2.5. Intensifikasi Sistem Pembayaran Nontunai

Upaya perluasan penggunaan transaksi digital (QRIS) terus dilakukan pada berbagai sektor dan segmen pengguna. Mempertimbangkan karakteristik Kepri yang menjadi tempat transit bagi wisatawan dan pusat akulturasi dari berbagai penduduk Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mendorong penggunaan QRIS, Bank Indonesia Kepri memperkuat strategi dalam peningkatan pengguna QRIS melalui sinergi dan kolaborasi, sosialisasi, *showcasing*, dan *onboarding* QRIS. Strategi perluasan implementasi QRIS yang dilaksanakan hingga triwulan IV 2025 antara lain:

a. Sinergi dan Kolaborasi bersama Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP), Pemda, Komunitas, Asosiasi Media, Pelaku Usaha dan Instansi Terkait.
b. Perluasan komunikasi QRIS *Cross Border* khususnya pada kawasan wisata dan transportasi internasional seperti Kapal Ferry.
c. Perluasan QRIS pada sektor prioritas, seperti kawasan wisata, pasar, kuliner, pelabuhan, layanan Kesehatan, rumah ibadah dan pembayaran pajak/retribusi.
d. Pemberian *Reward* bagi *merchant* dan *user* bekerjasama dengan PJP dan instansi terkait lainnya.
e. Edukasi/sosialisasi/*onboarding*/hiburan/perlombaan kerjasama dengan PJP dan instansi terkait lainnya:
    1) QRIS *Goes to School/Campus*;
    2) Kolaborasi pada kegiatan/event strategis di Kepri;
    3) Sinergi event strategis antar Unit/Fungsi Bank Indonesia.
f. Sinergi QRIS dengan Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk pembayaran pajak dan retribusi, serta belanja melalui fitur QRIS - Kartu Kredit Indonesia (KKI).
g. *On boarding* pada sektor pariwisata seperti hotel, travel agent, dan objek wisata.
h. *Showcase* dan QRIS *Experience* dalam memperluas transaksi QRIS pada event strategis.

Bank Indonesia Kepri konsisten mendorong pelaku usaha di sektor pariwisata serta sektor pendukung lainnya untuk mengimplementasikan QRIS sekaligus mengakselerasi ekosistem pembayaran digital khususnya di sektor pariwisata Kepri melalui intensifikasi sosialisasi. Sepanjang periode laporan, Bank Indonesia Kepri telah melakukan beberapa kegiatan dan sinergi event yaitu sosialisasi, FGD, dan rapat koordinasi bersama para *stakeholder* sterkait untuk meningkatkan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat. Adapun salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Bersama Rayakan Festival Digital Masyarakat Kepulauan Riau (BERLAYAR) 2025 yang merupakan gerakan inklusi digital di wilayah perbatasan melalui festival kreatif yang mengintegrasikan budaya lokal dengan teknologi pembayaran digital.

Ke depan, Bank Indonesia Kepri akan memperkuat perluasan QRIS, khususnya QRIS *Cross-Border* sejalan dengan letak geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia serta sebagian besar kunjungan wisman didominasi oleh kedua negara tersebut. Selain itu, Bank Indonesia Kepri juga akan memperluas publikasi QRIS Antarnegara pada kawasan pelabuhan lainnya yang merupakan pintu keluar masuk turis mancanegara.

7.2.5.2.6. Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

Pengembangan ETPD terus dilakukan dalam rangka perluasan *cashless society* dan keuangan inklusif dengan menyediakan kanal pembiayaan nontunai dalam pelaksanaan transaksi keuangan Pemerintah. Untuk mendukung pencapaian tersebut, Bank Indonesia Kepri mendorong dari aspek implementasi, realisasi, maupun lingkungan strategis, antara lain melalui perluasan kanal pembayaran digital dalam transaksi Pemerintah Daerah, peningkatan transaksi non-tunai melalui QRIS dan *Teller* untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta penguatan aspek lingkungan strategis, khususnya pelaksanaan sosialisasi oleh Pemerintah Daerah. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan hingga triwulan IV 2025 antara lain:

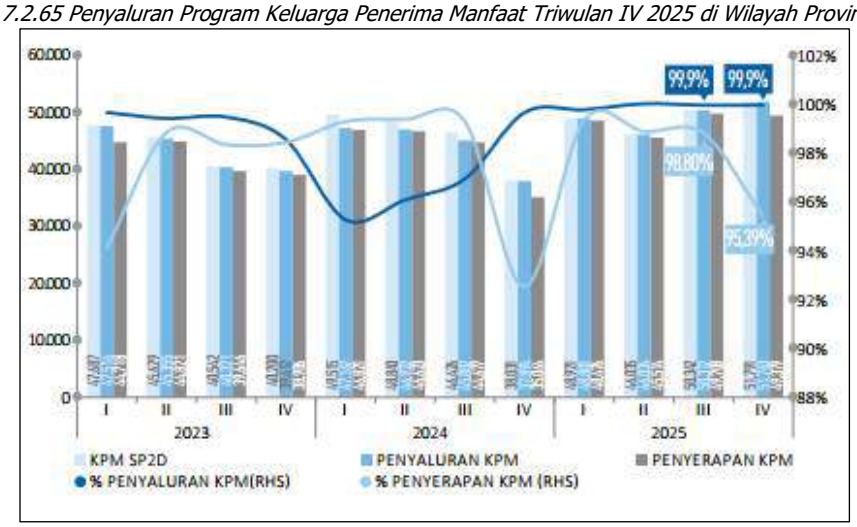
a. Rapat koordinasi & *capacity building* dengan Tim Teknis Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk membahas evaluasi dan tindak lanjut peta jalan masing-masing daerah.
b. Memfasilitasi antar bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) & Pemda untuk mendorong implementasi kanal digital & Integrasi *Cash Management System* (CMS).
c. Berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penerimaan untuk mendorong perluasan ekosistem nontunai.
d. *Coaching clinic* dan pendampingan pengisian Indeks ETPD.
e. Penyampaian *strategic advisory* kepada kepala daerah terkait kondisi, tantangan/isu & strategi TP2DD.
f. *High Level Meeting* (HLM) TP2DD untuk ekskalasi isu strategis & mendorong political will kepala daerah.
g. *Benchmarking* dan Studi Banding dengan daerah lain.

7.2.5.2.7. Bantuan Sosial Non Tunai

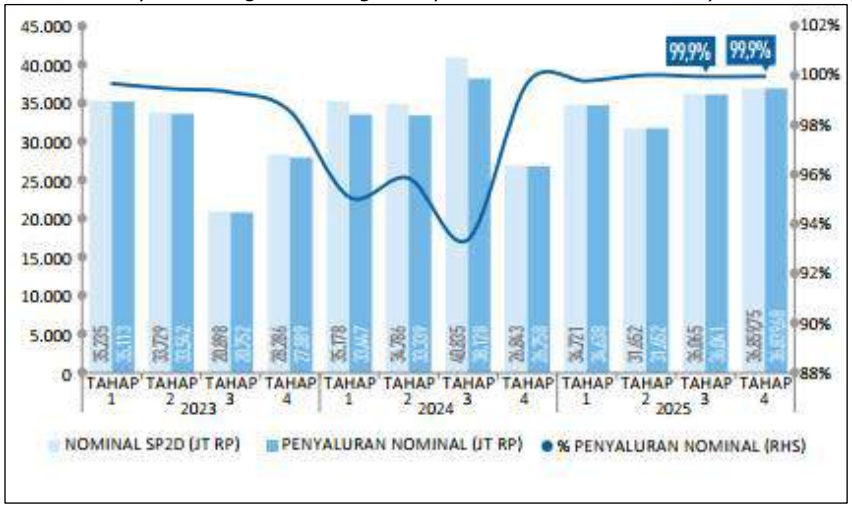
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Kepri mendukung akselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah melalui program penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) nontunai. Program Bansos yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Program Kartu Pra Kerja. Program Sembako dan PKH disalurkan melalui dua mekanisme yakni secara nontunai melalui Himbara dan tunai melalui PT Pos.

Realisasi penyaluran bantuan PKH pada tahap 4 yang mencakup periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2025 secara nominal telah mencapai sebesar Rp36,83 miliar, atau 99,95% dari pagu sebesar Rp36,85 miliar dengan target penyaluran sebanyak 51.791 KPM. Penyerapan bantuan PKH telah diserap oleh 51.763 KPM atau sebesar 99,95% dari target. Sementara itu, penyaluran program sembako berdasarkan jumlah KPM pada triwulan IV 2025 adalah sebesar 49.707 penerima dengan tingkat penyerapan 77,54% dari target penyaluran.

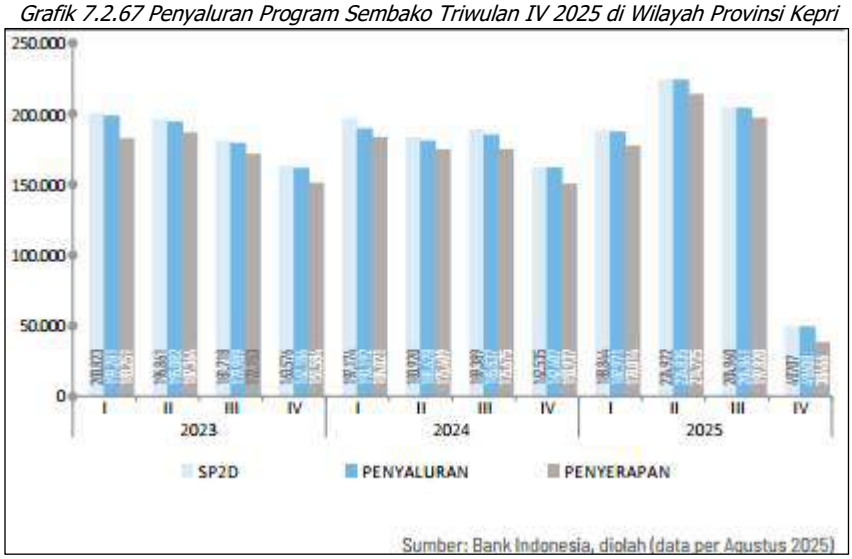
Grafik 7.2.65 Penyaluran Program Keluarga Penerima Manfaat Triwulan IV 2025 di Wilayah Provinsi Kepri



Grafik 7.2.66 Penyaluran Program Keluarga Harapan Triwulan IV 2025 di Wilayah Provinsi Kepri



Grafik 7.2.67 Penyaluran Program Sembako Triwulan IV 2025 di Wilayah Provinsi Kepri



7.2.5.3. Transaksi KUPVA BB dan PJP LR

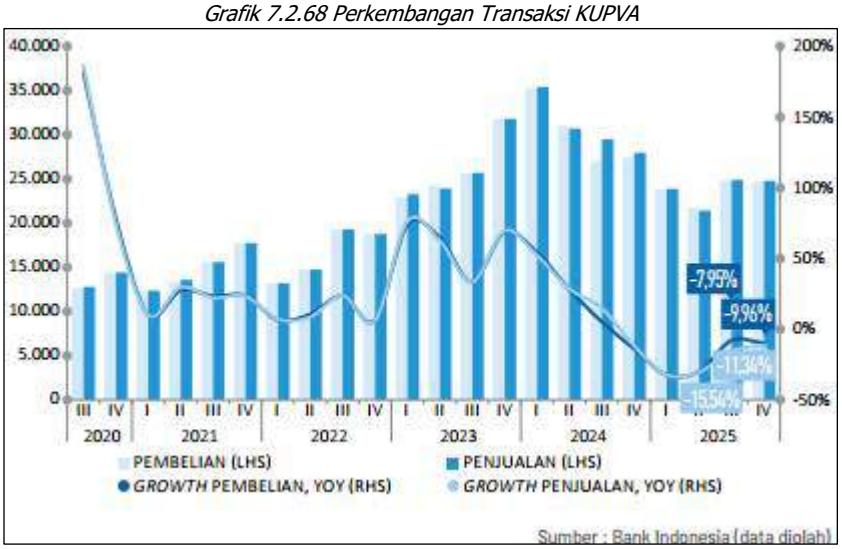
Dalam rangka menjaga kelancaran transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) di Provinsi Kepri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri terus melakukan monitoring perizinan dan pengawasan terhadap operasional 120 KUPVA BB dan 70 PJP LR yang berada di Provinsi Kepri hingga triwulan IV 2025.

7.2.5.3.1. Perkembangan Transaksi KUPVA BB

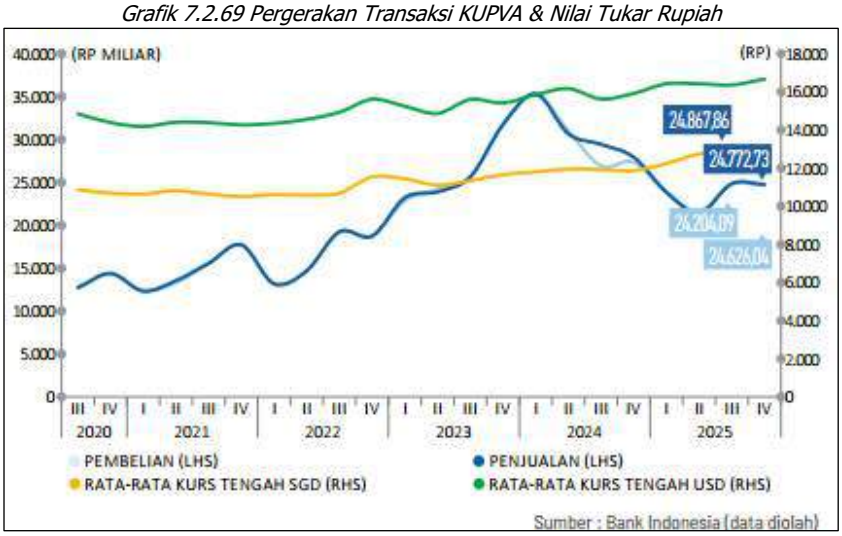
Perkembangan KUPVA BB di Kepri pada Triwulan IV 2025 menunjukan perubahan jumlah jaringan kantor jika dibandingkan dengan triwulan III 2025. Jumlah Kantor Pusat (KP) KUPVA BB meningkat dari 118 menjadi 120 kantor di triwulan IV 2025. Sementara itu, jumlah Kantor Cabang (KC) tidak berubah yakni tetap sebanyak 72 kantor.

Pada triwulan IV 2025, transaksi Uang Kertas Asing (UKA) didominasi oleh Dolar Singapura (SGD) sebesar 69,77% atau sejumlah Rp34,46 triliun, diikuti oleh Dolar Amerika Serikat (USD) sebesar 20,68% atau sejumlah Rp10,21 triliun, Ringgit Malaysia (MYR) sebesar 4,96% atau sejumlah Rp2,45 triliun, Renminbi Tiongkok (CNY) sebesar 1,94% atau sejumlah Rp956,81 miliar, dan mata uang lainnya sebesar 2,65% atau sejumlah Rp1,30 triliun. Secara keseluruhan, total transaksi UKA pada Triwulan IV 2025 setara dengan Rp49,39 triliun, mengalami penurunan sebesar 0,55% (qtq) atau turun setara dengan Rp273,64 miliar dibandingkan triwulan III 2025.

Grafik 7.2.68 Perkembangan Transaksi KUPVA



Grafik 7.2.69 Pergerakan Transaksi KUPVA & Nilai Tukar Rupiah



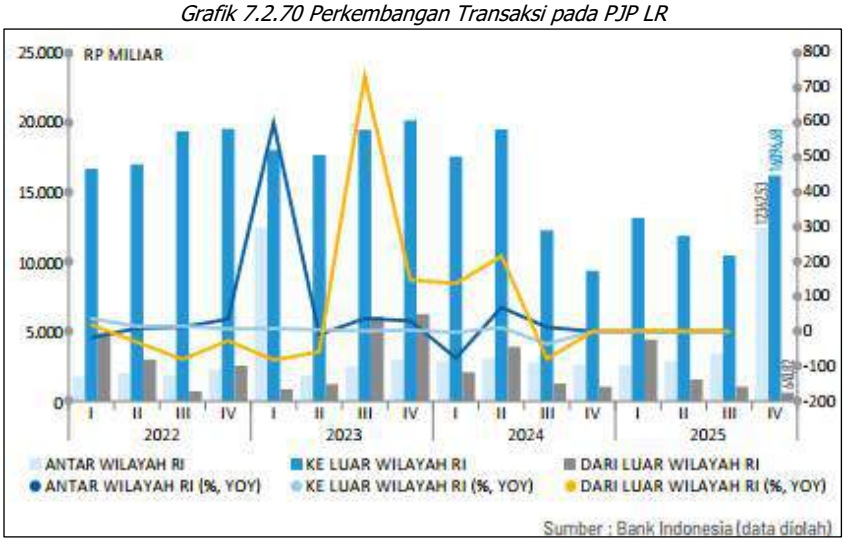
7.2.5.3.2. Perkembangan Transaksi PJP LR

Berdasarkan jenis transaksinya, komposisi transaksi pada PJP LR di Kepri didominasi oleh jenis transaksi ke luar wilayah Indonesia atau transaksi outgoing sebesar 55,31%, diikuti transaksi antar wilayah Indonesia atau transaksi domestik dengan pangsa sebesar 42,48% dan transaksi dari luar wilayah Indonesia atau transaksi *incoming* sebesar 2,20%. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pada triwulan IV 2025, PJP LR di Provinsi Kepri lebih banyak digunakan untuk memfasilitasi pengiriman dana dari wilayah Indonesia ke luar negeri antara lain untuk keperluan pembayaran transaksi pembelian barang impor maupun transaksi lainnya.

Jumlah PJP LR di Provinsi Kepri pada triwulan IV 2025 meningkat dibanding triwulan sebelumnya, yaitu dari 68 menjadi 70 PJP LR. Dari nominal transaksi, transaksi domestik dan *outgoing* mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Nominal transaksi domestik tumbuh 380,17% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh 24,62% (yoy). Transaksi outgoing juga tumbuh pada triwulan IV

sebesar 72,94% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 14,66% (yoy). Adapun transaksi incoming mengalami kontraksi sebesar 39,07% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 16,13% (yoy). Secara umum, pada triwulan IV 2025 total pengiriman dana oleh PJP LR di Provinsi Kepri meningkat dari yang sebelumnya terkontraksi sebesar 8,08% (yoy) menjadi tumbuh 124,99% (yoy) atau dari sebesar Rp14,91 triliun pada triwulan III 2025 menjadi sebesar Rp29,10 triliun pada triwulan IV 2025.

Grafik 7.2.70 Perkembangan Transaksi pada PJP LR

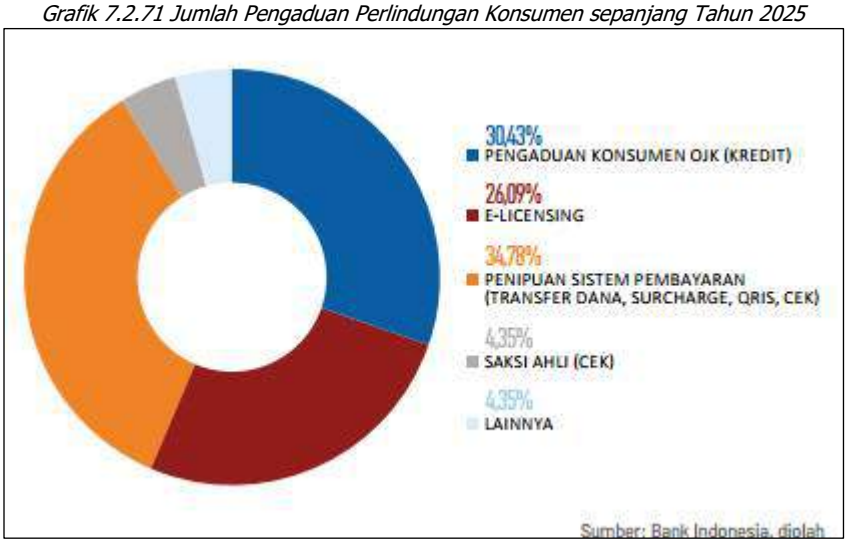


7.2.5.3.3. Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Provinsi Kepulauan Riau

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau secara aktif melakukan fungsi edukasi pelindungan konsumen melalui sosialisasi daring dan luring serta pembuatan konten infografis dan video di media sosial. Hingga triwulan IV 2025 telah dilaksanakan berbagai edukasi yang bertujuan meningkatkan literasi digital dan kesadaran masyarakat terhadap risiko penipuan di dunia digital. Kegiatan ini meliputi seminar, sosialisasi, dan kuis yang berfokus pada edukasi hak dan kewajiban konsumen antara lain pelindungan data pribadi, tips dan trik aman bertransaksi, serta langkah-langkah pencegahan terhadap berbagai modus penipuan digital. Pemanfaatan media sosial juga dioptimalkan untuk mensosialisasikan informasi penting terkait pelindungan konsumen. Edukasi pelindungan konsumen turut dilakukan melalui kunjungan sekolah serta sosialisasi pada event Gebyar Melayu Pesisir dan Bersama Rayakan Festival Digital Masyarakat Kepulauan Riau (BERLAYAR). Kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi luring dan bazaar,serta diperkuat melalui edukasi di stasiun radio berupa siaran langsung dan himbauan kepada masyarakat di Kota Batam

Sepanjang tahun 2025, KPwBI Kepri telah menerima 23 (dua puluh tiga) pengaduan konsumen dan seluruhnya telah diselesaikan, meliputi pengaduan konsumen pembiayaan, *e-licensing*, penipuan sistem pembayaran, saksi ahli, serta lainnya.

Grafik 7.2.71 Jumlah Pengaduan Perlindungan Konsumen sepanjang Tahun 2025



7.2.6. Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan



Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan perbaikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2025. Sementara itu, kesejahteraan petani mengalami perbaikan sebagaimana tergambar dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang meningkat secara umum dan tetap terjaga di atas 100 yang berarti pendapatan petani masih lebih besar dibandingkan pengeluaran.

7.2.6.1. Ketenagakerjaan[3]

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Kepri yang tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)[4] relatif stabil dengan kecendrungan meningkat tipis secara tahunan. TPT pada Agustus 2025 berada pada level 6,45%, lebih tinggi dibandingkan Agustus 2024 yang tercatat 6,39%. Secara spasial, perubahan TPT tersebut terjadi karena perbedaan kondisi antar wilayah. TPT perdesaan meningkat dari 2,50% pada Agustus 2024 menjadi 3,56% pada Agustus 2025, sementara TPT perkotaan mengalami perbaikan dari 6,74% pada Agustus 2024 menjadi 6,70% pada Agustus 2025.

Pada Sakernas 2025, terdapat penyesuaian pola rilis sehingga publikasi data dilakukan secara triwulanan. Pada November 2025, TPT Kepri tercatat 6,35%, turun 0,10 persen poin dibanding Agustus 2025. Pada periode yang sama, TPT perdesaan tercatat sebesar 3,89%, naik 0,33 persen poin, sedangkan TPT perkotaan sebesar 6,55%, menurun 0,15 persen poin dibanding periode sebelumnya.

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, TPT secara tahunan menurun pada kelompok pendidikan SMP ke bawah dan Perguruan Tinggi (Diploma dan Universitas) masing-masing dari rata-rata sebesar 5,87% dan 4,84% pada Agustus 2024 menjadi 3,17% dan 4,69% pada Agustus 2025. Perkembangan ini mengindikasikan perbaikan serapan tenaga kerja pada kedua kelompok pendidikan tersebut. Sementara itu, pada kelompok SMA/SMK TPT meningkat dari rata-rata sebesar 7,32% pada Agustus 2024 menjadi 8,95% pada Agustus 2025.

Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepri masih didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan dengan pangsa sebanyak 25,14% dari jumlah tenaga kerja pada November 2025. Hal ini mencerminkan bahwa LU Industri Pengolahan memiliki peran yang strategis sebagai penyumbang PDRB terbesar dan menyediakan lapangan kerja terbanyak di Provinsi Kepri. LU berikutnya yang banyak menyerap tenaga kerja secara berurutan yakni LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (17,56%), LU Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan (13,77%), LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (11,57%), dan LU Konstruksi (8,18%).

Tabel 7.2.18 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kepri



[3] *Pada sakernas 2025, indikator ketenagakerjaan dirilis pada periode Februari, Agustus, dan November 2025.*

[4] *Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja*

Tabel 7.2.19 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan



Secara tahunan, pangsa kelompok berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, dan pekerja bebas mengalami penurunan masing-masing 0,92 persen poin, 0,41 persen poin, 2,29 persen poin dan 0,47 persen poin pada bulan Agustus 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara peningkatan pangsa jumlah pekerja terjadi pada kelompok berusaha dibantu buruh tidak tetap dan pekerja keluarga yang masing-masing meningkat sebesar 2,06 persen poin dan 2,01 persen poin pada bulan Agustus 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tabel 7.2.20 Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri



Tabel 7.2.21 Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri (%)



Pada November 2025, Buruh/karyawan merupakan status pekerjaan yang paling dominan di Provinsi Kepri dengan porsi sebesar 65,32%, diikuti kelompok berusaha sendiri (wiraswasta mandiri) sebesar 16,38%, dan pekerja keluarga / tak dibayar dengan porsi sebesar 5,86%.

7.2.6.2. Kesejahteraan Masyarakat

7.2.6.2.1. Nilai Tukar Petani ((NTP)

NTP adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Nilai NTP yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan analisis triwulanan, tingkat kesejahteraan petani pada triwulan IV 2025 yang merupakan rata-rata bulan Oktober - Desember 2025 mengalami peningkatan

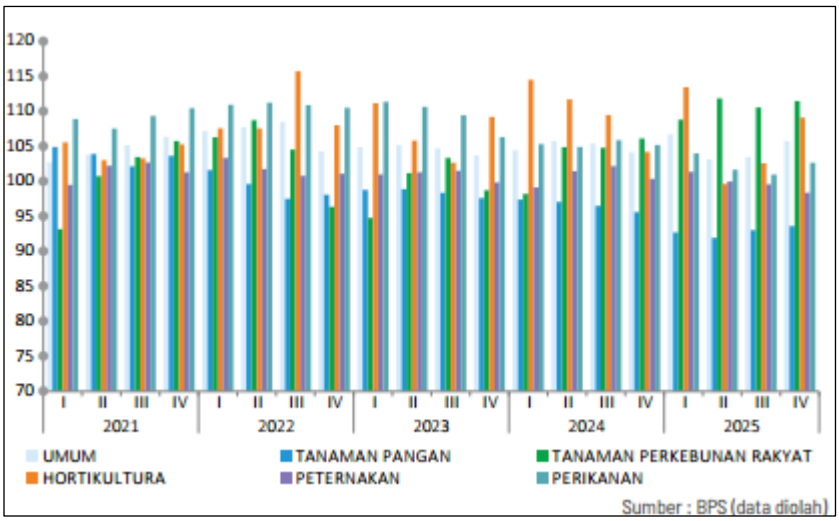
dibanding triwulan sebelumnya (rata – rata bulan Juli - September 2025). Ratarata NTP pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 105,61, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 103,33. Peningkatan tersebut tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya NTP pada subkelompok Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Rakyat, dan Perikanan.

Grafik 7.2.72 Perkembangan NTP



Berdasarkan subsektor, NTP triwulan tertinggi tercatat pada sub kelompok Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 111,31, sementara NTP terendah tercatat pada sub-kelompok Peternakan sebesar 98,28. Sub kelompok Hortikultura mencatatkan kenaikan dari 102,48 pada triwulan III 2025 menjadi 108,96 pada triwulan IV 2025. Di sisi lain, penurunan turut terjadi pada sub-kelompok Peternakan yang tercatat 99,47 pada triwulan III 2025 menjadi 98,28 pada triwulan IV 2025.

Grafik 7.2.73 NTP Berdasarkan Subsektor



Tabel 7.2.22 Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri



7.2.6.2.2. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri pada September 2025 tercatat sebanyak 114.550 orang, menurun dibanding Maret 2025 sebesar 117.280 orang. Sejalan dengan itu, garis kemiskinan pada September 2025 meningkat dari Rp832.410/kapita/bulan pada Maret 2025 menjadi Rp870.738/kapita/bulan pada September 2025. Di sisi lain, Indeks Kedalaman Kemiskinan pada periode September 2025 tercatat sebesar 0,601%, lebih rendah dibandingkan dengan periode Maret 2025 yang sebesar 0,688%. Penurunan indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan pada September 2025 turut mengalami penurunan dari 0,179% pada Maret 2025 menjadi sebesar 0,145% pada September 2025.

Tabel 7.2.23 Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri



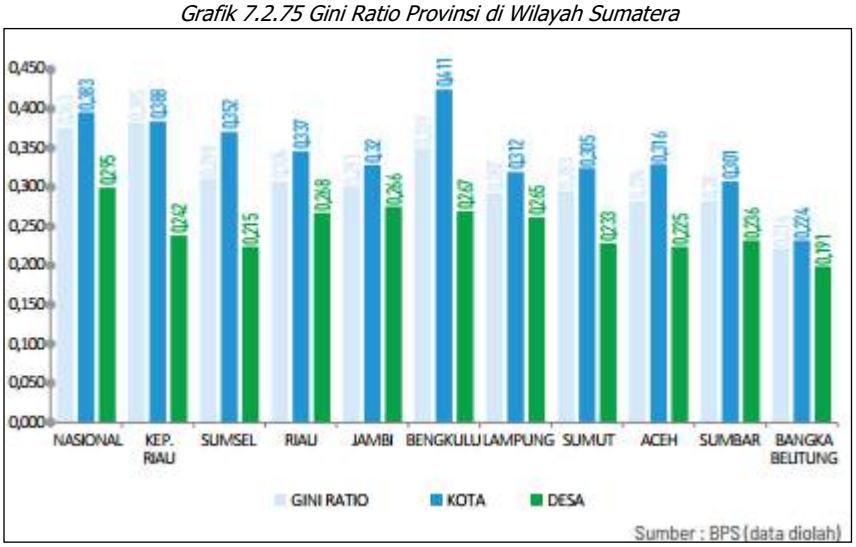
7.2.6.2.3. Gini Ratio (GR)

Gini Ratio[5] Provinsi Kepri pada September 2025 tercatat sebesar 0,385, meningkat dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,382. Kenaikan Gini Ratio mengindikasikan bahwa adanya ketimpangan pendapatan antar penduduk di Provinsi Kepri pada periode Maret – September 2025. Berdasarkan lokasi, tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Gini Ratio perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,388, meningkat dari Maret 2025 sebesar 0,383. Sementara itu, Gini Ratio di perdesaan tercatat sebesar 0,242, meningkat dari Maret 2025 yang tercatat sebesar 0,238. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, Indeks Gini Ratio di Provinsi Kepri adalah yang

Grafik 7.2.74 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepri



Grafik 7.2.75 Gini Ratio Provinsi di Wilayah Sumatera



[5] Gini Ratio merupakan ratio ketimpangan pengeluaran penduduk yang nilainya antara 0 sampai 1. Gini Ratio yang semakin tinggi mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

7.2.6.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Provinsi Kepri pada tahun 2025 tercatat sebesar 80,53, meningkat 0,64 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 79,89. Peningkatan IPM Kepri pada 2025 didukung oleh perbaikan ketiga dimensi penyusunnya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta dimensi standar hidup layak yang diukur melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, angka UHH saat Lahir di Kepri tercatat sebesar 75,46, artinya bayi yang lahir pada tahun 2025 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,46 tahun, lebih lama 0,34 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun 2024. Angka UHH ini turut menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik.

Grafik 7.2.76 Perkembangan IPM Kepri



Tingkat Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami peningkatan menjadi 13,28 tahun yang diikuti peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi 10,72 tahun. Peningkatan angka harapan sekolah maupun rata-rata lama sekolah memberikan sinyal positif bahwa kualitas SDM di Provinsi Kepri akan semakin baik. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat pengeluaran per kapita juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp15.881.000,00, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15.573.000,00.

Secara kewilayahan, seluruh daerah di Provinsi Kepri mengalami peningkatan IPM. IPM Kota Batam dan Tanjungpinang termasuk dalam kelompok IPM sangat tinggi dengan angka IPM masingmasing 83,80 dan 82,02. Sementara itu 5 (lima) kabupaten lainnya termasuk dalam kelompok IPM tinggi yang meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kepulauan Anambas. Secara keseluruhan, semua Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau mencatatkan peningkatan IPM dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 7.2.24 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri Menurut Komponen



Tabel 7.2.25 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri berdasarkan wilayah kabupaten/kota



7.2.7. Prospek Perekonomian Daerah

Prospek perekonomian global diprakirakan cenderung stagnan dengan ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi. Kondisi ini diprakirakan didorong oleh dampak tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) serta berlanjutnya tensi geopolitik. Sementara itu, perekonomian Indonesia diprakirakan tetap tumbuh kuat sejalan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh berbagai program stimulus Pemerintah, pelonggaran kebijakan moneter, serta membaiknya ekspektasi masyarakat. Di lain sisi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara keseluruhan tahun 2026 diprakirakan tumbuh melambat didorong oleh normalisasi pasca realisasi yang tinggi pada 2025 (*base effect*).

Inflasi Kepri pada tahun 2026 diprakirakan tetap terkendali dalam kisaran target 2,5±1% (yoy). Stabilitas inflasi tersebut didukung oleh normalisasi harga pangan dan energi global, perbaikan rantai pasok, serta penguatan sinergi pengendalian inflasi di daerah melalui peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

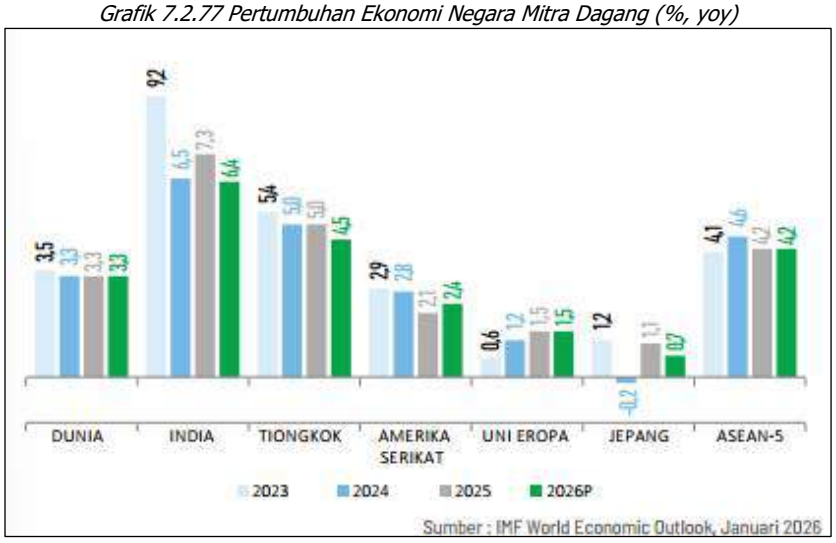
7.2.7.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi 2025 dan 2026

Perekonomian global 2026 diprakirakan cenderung stagnan dibanding estimasi tahun 2025. Berdasarkan proyeksi dari *International Monetary Fund* (IMF) pada Januari 2026, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2026 diprakirakan sebesar 3,3% (yoy), atau meningkat 0,2 persen poin dibandingkan prakiraan pada bulan Oktober 2025, serta sama dengan estimasi pertumbuhan tahun 2025 yang sebesar 3,3% (yoy). Perbaikan proyeksi tersebut didukung oleh revisi ke atas pada pertumbuhan negara maju (*advanced economies*) khususnya AS dan pada negara *emerging market and developing economies* khususnya di wilayah Asia. Pertumbuhan ekonomi AS mengalami revisi atas menjadi 2,4% (yoy) seiring meningkatnya stimulus fiskal dan tingginya investasi, termasuk *Artificial Intelligence* (AI). Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-5 (Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia) di tahun 2026 diproyeksikan sebesar 4,2% (yoy), stagnan

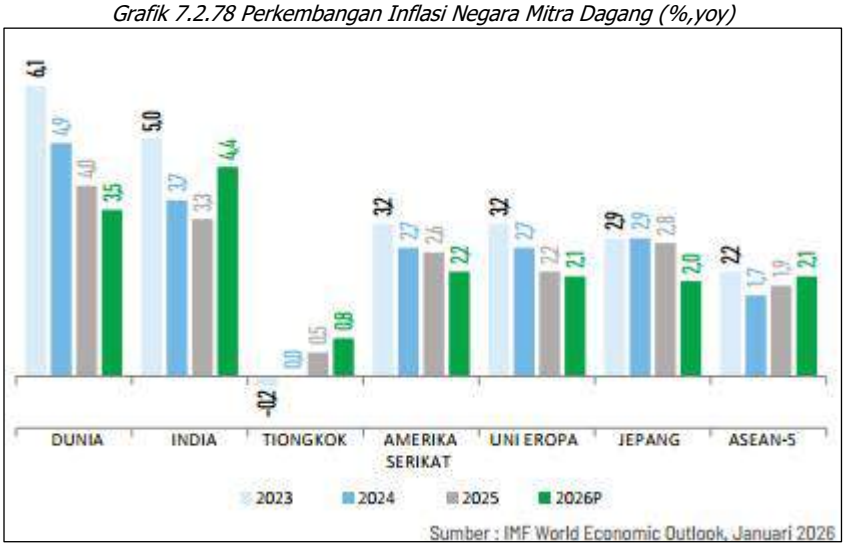
dibandingkan estimasi pertumbuhan pada 2025 yang juga sebesar 4,2% namun mengalami revisi atas dari proyeksi sebelumnya.

Tekanan inflasi global diprakirakan terus menurun, dari estimasi 4,1% (yoy) pada tahun 2025 menjadi 3,8% (yoy) pada tahun 2026. Penurunan ini terutama didorong oleh berlanjutnya penurunan harga komoditas energi dunia. Meski demikian, potensi berlanjutnya konflik geopolitik global tetap menjadi risiko yang dapat mendorong kembali tekanan inflasi. Tren disinflasi yang masih berlangsung diprakirakan akan membuka ruang bagi kebijakan moneter yang lebih akomodatif.

Grafik 7.2.77 Pertumbuhan Ekonomi Negara Mitra Dagang (%, yoy)



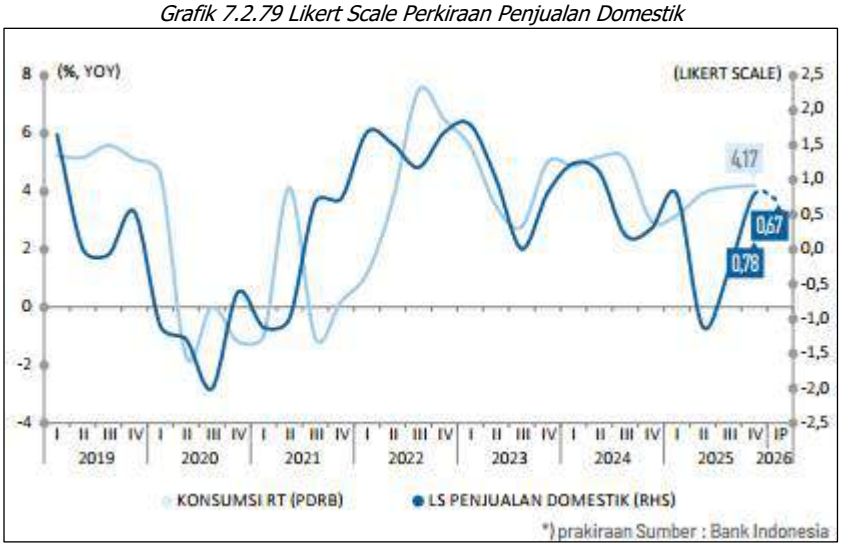
Grafik 7.2.78 Perkembangan Inflasi Negara Mitra Dagang (%,yoy)



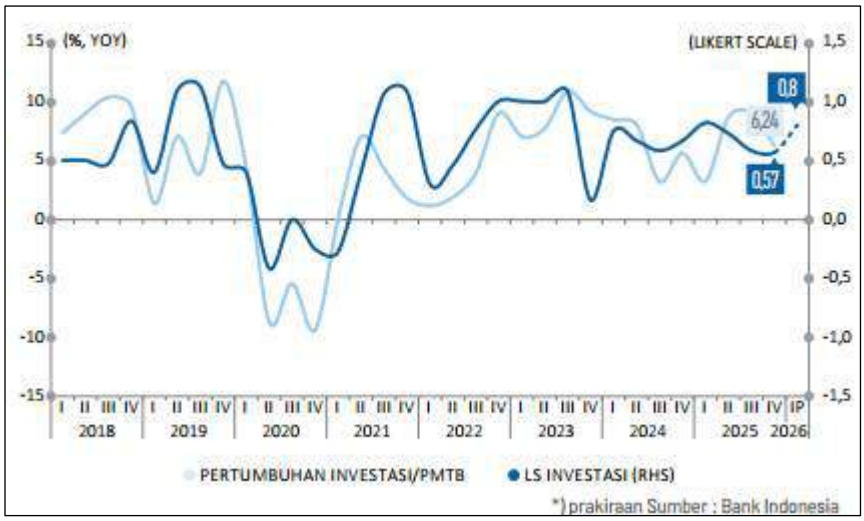
Ekonomi Indonesia diperkirakan tetap berdaya tahan di tengah tingginya ketidakpastian global. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026 berada pada kisaran 4,9% - 5,7% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi diprakirakan tetap baik didukung oleh berbagai program stimulus Pemerintah, pelonggaran kebijakan moneter, ekspektasi konsumen yang terus membaik dan peningkatan investasi pemerintah utamanya terkait hilirisasi SDA. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada 2026

juga didorong oleh berbagai kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Grafik 7.2.79 Likert Scale Perkiraan Penjualan Domestik



Grafik 7.2.80 Likert Scale Perkiraan Investasi



Tabel 7.2.26 Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2025

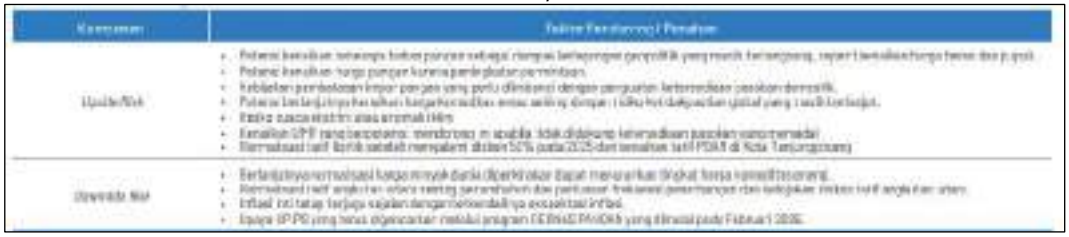
Komponen	Uraian Pendorong / Penahan	Icon
Kebijakan Moneter Akomodatif		▲
Kunjungan Wisatawan		▲
Proyek Strategis Nasional (PSN) dan		▲
Investasi		▼
Pertambangan		▼
Pengalihan Daerah Industri		▼
Risiko Geopolitik		▼

Pertumbuhan ekonomi Kepri tahun 2026 diprakirakan tetap tumbuh, namun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi pengeluaran, perekonomian Kepri didukung oleh konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga yang terakselerasi dibanding 2025. Hal ini sejalan dengan kenaikan UMR dan multiplier effect peningkatan jumlah wisatawan di 2025 yang kembali ke level pra-pandemi dan diprakirakan terus meningkat pada 2026. Hal ini didukung oleh hasil Survei Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau yang menunjukan *likert scale* (LS) penjualan domestik yang mengalami peningkatan. Sementara itu, net ekspor dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tetap tumbuh positif namun melambat dibandingkan tahun sebelumnya akibat normalisasi pasca kenaikan yang masif di 2025. Adapun dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Kepri terutama LU Konstruksi dan LU Perdagangan Besar dan Eceran.Akselerasi LU Perdagangan diperkirakan bersumber dari meningkatnya permintaan sejalan dengan kebijakan moneter yang lebih akomodatif serta meningkatnya kunjungan wisatawan. Sementara itu, LU Industri pengolahan juga diprakirakan tumbuh namun sedikit mengalami perlambatan dibanding 2025. Pertumbuhan yang tetap positif ini sejalan dengan meningkatnya penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) secara global diharapkan dapat mendorong permintaan terhadap industri semikonduktor dan elektronik. Dengan pertimbangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Provinsi Kepri pada tahun 2026 di prakirakan tumbuh pada kisaran 6,38% - 7,18% (yoy).

7.2.7.2. Prospek Inflasi 2025 dan 2026

Tekanan inflasi Provinsi Kepri pada tahun 2026 diprakirakan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy). Inflasi pada tahun 2026 diprakirakan terutama bersumber dari beberapa kelompok komoditas, antara lain (1) kelompok makanan, minuman dan tembakau; (2) transportasi, dan (3) penyediaan makanan dan minuman. Tekanan inflasi diprakirakan akan tetap stabil sejalan dengan normalisasi pasokan, harga komoditas global, dan rantai pasok dunia. Selain itu, sinergi TPID melalui program GPIPS diprakirakan dapat meredam tekanan inflasi sehingga dapat terjaga dalam kisaran sasaran. Selanjutnya, moderasi tarif angkutan udara sejalan dengan penambahan jumlah armada/rute penerbangan diprakirakan menahan tekanan inflasi lebih lanjut. Terjaganya inflasi di dalam kisaran sasaran tersebut turut didukung oleh konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah melalui TPID

Tabel 7.2.27 Risiko Inflasi Kepulauan Riau Tahun 2025



Risiko inflasi yang perlu diperhatikan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Potensi kenaikan harga beberapa komoditas pangan sebagai dampak berlanjutnya ketegangan geopolitik, seperti kenaikan harga beras dan pupuk.

2. Kebijakan pembatasan impor pangan yang perlu diimbangi dengan penguatan pasokan domestik agar tidak menimbulkan tekanan harga.
3. Potensi berlanjutnya kenaikan harga komoditas emas seiring dengan risiko ketidakpastian global yang masih tinggi.
4. Risiko cuaca ekstrim atau anomali iklim yang berpotensi mengganggu produksi dan distribusi pangan sehingga meningkatkan volatilitas dan harga komoditas pangan.
5. Kenaikan UMR yang dapat mendukung perbaikan konsumsi masyarakat namun berpotensi memberikan tekanan dari sisi permintaan (*demand pull*) apabila ketersediaan pasokan tidak seimbang.
6. Normalisasi tarif listrik serta potensi dampak kenaikan tarif PDAM di Kota Tanjungpinang

7.2.7.3. Rekomendasi

Dalam rangka mendorong momentum pertumbuhan ekonomi Kepri, sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah dan *stakeholders* lainnya akan terus diperkuat. Sehubungan hal tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, antara lain:

1. Mendorong peningkatan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui:
    a) Penyediaan insentif dan penguatan regulasi, termasuk perluasan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS RBA).
    b) Meningkatkan promosi investasi dengan menjadikan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai daya tarik utama, didukung oleh lokasi strategis serta kepastian iklim investasi.
    c) Mendukung peningkatan keunggulan komparatif daya saing investasi di Kepri di tengah persaingan regional yang semakin ketat (termasuk dengan berdirinya *Johor-Singapore Special Economic Zone* dan *Eastern Economic Corridor*) melalui penguatan insentif bagi investor dan perbaikan infrastruktur.
2. Optimalisasi potensi sektor pariwisata melalui:
    a) Penguatan aspek 3A dan 2P (Akses, Amenitas, Atraksi, Pelaku, dan Promosi) untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata, antara lain melalui penambahan event, peningkatan promosi MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) serta pengembangan *quality tourism*.
    b) Mendukung penerapan kebijakan *short term* visa guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke wilayah Kepri.
    c) Mendorong normalisasi frekuensi penerbangan dan pembukaan rute baru di wilayah Kepri untuk memperkuat kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara, sekaligus menjaga stabilitas harga pada komoditas angkutan udara.

d) Mengoptimalkan realisasi belanja pemerintah, baik melalui APBD maupun APBN, untuk menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian.

e) Mendorong proses hilirisasi bahan baku dan sumber daya alam Kepri untuk memperkuat *local value chain* (LVC).

f) Memperluas digitalisasi sistem pembayaran melalui berbagai kanal, termasuk peningkatan akseptansi QRIS oleh *merchant dan user*, serta promosi QRIS *cross-border* untuk mendukung konsumsi masyarakat.

g) Memperluas penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di bawah koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), sehingga dapat mengoptimalkan realisasi pendapatan dan belanja daerah.

h) Memperkuat program pemberdayaan UMKM melalui dukungan pembiayaan, *capacity building*, perluasan akses pasar, dan pendampingan agar mampu menghasilkan produk unggulan berorientasi ekspor.

i) Mendorong capaian target dalam sembilan langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED)

Selanjutnya, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi dan daya beli masyarakat, antara lain:

1. Melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan GPIPS dengan fokus pada 3 (tiga) periode waktu, yaitu:
   a) jangka pendek: prioritas Penguatan Upaya Pengendalian Inflasi Menjelang HBKN
   b) jangka menengah-panjang: Antisipasi terhadap potensi risiko hidrometeorologi untuk memperkuat ketahanan pangan
   c) Jangka Menengah-Panjang: Penguatan sinergi Satgas untuk percepatan pemulihan bencana pada lahan pertanian terdampak sebagai salah satu pemasok utama komoditas pangan di Kepri
2. Mendorong peningkatan produksi pangan di tengah keterbatasan lahan subur, antara lain melalui budidaya cabai merah oleh koperasi dan kelompok tani serta pembangunan greenhouse untuk mengatasi kendala cuaca. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga dapat dioptimalkan dalam pengembangan komoditas pangan strategis.
3. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antar anggota TPID melalui rapat koordinasi, rapat teknis, dan *High Level Meeting* (HLM) untuk merumuskan kebijakan pengendalian inflasi. Selain itu, pengendalian ekspektasi masyarakat perlu dilakukan dengan penyebaran informasi terkait pasokan, kewajaran harga, serta kampanye belanja bijak melalui TV, radio, media sosial, dan *flyer*.
4. Meningkatkan sinergi antar instansi dalam TPID melalui penyelarasan program pendukung GPIPS.

5. Mengoptimalkan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan pangan, khususnya yang berasal dari luar daerah dengan dukungan dan kerja sama bersama asosiasi distributor.
6. Memperkuat koordinasi dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam pelaksanaan program stabilisasi harga pangan strategis.

7.2.8. Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada regulasi terkait dengan perencanaan pembangunan daerah dan regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, yaitu merujuk pada ketentuan dalam arah kebijakan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 berpedoman dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Kebijakan pendapatan Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas, dengan menghitung potensi dari masing-masing sumber pendapatan berdasarkan kondisi objektif terkini. Secara umum kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada Upaya peningkatan pendapatan daerah, meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan dana transfer, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Untuk mengupayakan optimalisasi Pendapatan Daerah diperlukan kebijakan-kebijakan di bidang Pendapatan Daerah khususnya sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dititik beratkan untuk meningkatkan PAD melalui kontribusi peningkatan Pajak Kendaraan bermotor. Sedangkan kebijakan belanja Daerah diprioritaskan untuk beberapa jenis belanja. Prioritas pertama untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur dalam peraturan Perundang-undangan (*mandatory spending*), meliputi : (1) Belanja Fungsi Pendidikan; (2) Belanja infrastruktur pelayanan publik; (3) Belanja untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan; (4) Belanja pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah; dan (5) Belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Selain itu prioritas pertama juga untuk membiayai Belanja Mengikat (*Mandatory Expenditure*), digunakan untuk: (1) Belanja Pegawai termasuk Gaji PPPK; (2) Belanja DAU, DAK, dan Dana Insentif Fiskal; (3) Belanja Operasional Kantor.

Selain itu, arah kebijakan belanja digunakan untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 – 2029, selanjutnya untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya. Kebijakan pembiayaan, untuk penerimaan pembiayaan daerah berasal dari penerimaan Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun 2024 yang telah diaudit oleh BPK RI menjadi bagian dari penerimaan pembiayaan daerah tahun 2025.

Implementasi kebijakan ekonomi yang ditetapkan membutuhkan anggaran. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mewujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp3.937.501.110.900,44 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Target Pendapatan Daerah pada APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah sebesar Rp3.910.214.946.462,43 dan Belanja Daerah sebesar Rp3.932.501.110.900,44 dengan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp27.286.164.438,01 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00.

7.2.8.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Penyusunan Pendapatan Daerah berkaitan dengan penyesuaian penetapan proyeksi target pendapatan daerah dengan mempertimbangkan hasil evaluasi realisasi penerimaan pendapatan daerah sampai dengan bulan Juni 2025 dan adanya penyesuaian terhadap proyeksi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Dana Transfer Umum dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan ekonomi makro dan fiskal nasional terkait dengan dana transfer ke daerah, kebijakan harga bahan bakar minyak, perkembangan pemasaran industri otomotif, kondisi perekonomian daerah yang terkorelasi dengan daya beli masyarakat, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya. Target Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp3.918.402.282.363,00 dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 7.2.28 Perbandingan Target Pendapatan pada APBD dan Perubahan Pergeseran APBD TA 2025

URAIAN	APBD	PERUBAHAN PERGESERAN APBD	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4 = (3-2)	5 = (4/2*100)
Pendapatan Daerah				
Pendapatan Asli Daerah	1.760.011.907.866,00	1.904.763.732.160,43	144.751.824.294,43	8,22
Pendapatan Transfer	2.157.066.271.997,00	2.004.127.111.802,00	(152.939.160.195,00)	(7,09)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.324.102.500,00	1.324.102.500,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Daerah	**3.918.402.282.363,00**	**3.910.214.946.462,43**	**(8.187.335.900,57)**	**(0,21)**

Dalam mengupayakan pencapaian target Pendapatan Daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan terus berupaya melakukan optimalisasi Pendapatan Daerah. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan di bidang pendapatan daerah dalam Tahun 2025, berbagai upaya peningkatan kinerja pendapatan akan terus ditempuh baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat serta memegang teguh prinsip prinsip akuntabilitas dan

transparansi. Upaya yang di tempuh untuk mendorong peningkatan Pendapatan Daerah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan regulasi pelaksanaan perpajakan daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada UU HKPD dan Peraturan pelaksanaannya;
2. Percepatan Pelaksanaan pemungutan Pajak Alat Berat melalui koordinasi dengan OPD terkait;
3. Optimalisasi pemungutan PBBKB melalui monitoring berkala dan Pemeriksaan kepatuhan pelaporan Wajib Pungut PBBKB;
4. Inventarisasi dan identifikasi potensi pajak, baik yang sudah dipungut maupun potensi pajak yang belum dan akan dipungut, Seperti optimalisasi penagihan terhadap pembayaran tunggakan pajak, penggalian potensi baru dari Pajak Alat Berat, dan berkoordinasi dengan Kemendagri secara periodik terkait peraturan yang mengatur Nilai jual Kendaraan Bermotor dan Alat Berat;
5. Melakukan sosialisasi dan penyeberluasan informasi ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru melalui berbagai media komunikasi dan publikasi;
6. Optimalisasi pelaksanaan Sinergi dan kerjasama pemungutan Opsen Pajak dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Meningkatkan sinergi dan kerjasama optimalisasi pemungtan pajak daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
9. Meningkatkan pelayanan Samsat dengan beberapa inovasi;
10. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
11. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai Upaya meningkatkan retribusi daerah;
12. Meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan OPD Penghasil dan instansi terkait dalam penggalian potensi retribusi sebagai upaya peningkatan pendapatan retribusi daerah;
13. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi berupa deviden secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
14. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;
15. Revitalisasi dan pendayagunaan kekayaan daerah agar untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
16. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;

17. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah; dan

18. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, instansi terkait, dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka penyelesaiaan kinerja sebagai sarat salur serta peningkatan pendapatan Dana Transfer ke Daerah.

7.2.8.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Secara umum Kebijakan Belanja Daerah adalah upaya yang dilakukan pemerintah agar belanja daerah dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan, dan Pemerintah Daerah tidak akan memperoleh pembayarannya Kembali. Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Menetapkan Belanja Daerah sebesar Rp3.932.501.110.900,44 untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 7.2.29 Perbandingan Target Belanja pada APBD dan Perubahan Pergeseran APBD TA 2025

URAIAN	APBD	PERUBAHAN PERGESERAN APBD	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4 = (3-2)	5 = (4/2*100)
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI	2.883.865.776.275,89	2.944.090.151.988,51	60.224.375.712,62	2,09
BELANJA MODAL	278.074.825.826,11	269.313.511.475,33	(8.761.314.350,78)	(3,15)
BELANJA TIDAK TERDUGA	109.748.000.000,00	2.281.396.903,60	(107.466.603.096,40)	(97,92)
BELANJA TRANSFER	646.953.680.261,00	716.816.050.533,00	69.862.370.272,00	10,8
JUMLAH BELANJA	**3.918.642.282.363,00**	**3.932.501.110.900,44**	**13.858.828.537,44**	**0,35**

Kebijakan belanja daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 secara umum difokuskan untuk:

1. Penyesuaian belanja daerah sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

2. Penyesuaian belanja daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;

3. Penyesuaian belanja daerah sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

4. Penyesuaian belanja daerah sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024;
5. Penyesuaian belanja daerah sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2025;
6. Penyesuaian belanja daerah terhadap perubahan proyeksi pendapatan asli daerah hingga akhir tahun 2025, seperti perubahan estimasi pada Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Rokok, dan Pajak Alat Berat (PAB);
7. Penganggaran kembali atas penerimaan SiLPA Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil audit BPK Provinsi Kepulauan Riau;
8. Penyesuaian belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan pemerintah pusat;
9. Pelaksanaan Program Asta Cita sesuai Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Penyesuaian belanja Gaji ASN akibat dari pengangkatan CPNS dan PPPK baru sebagaimana hasil perhitungan dan rekonsiliasi gaji yang telah dilakukan pada seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
11. Penyesuaian penganggaran dan pelaksanaan kegiatan mendesak yang telah dianggarkan melalui mekanisme mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;dan
12. Pembayaran atas Kewajiban Pihak Ketiga (Tunda Bayar) untuk Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun Anggaran sebelumnya.

Dalam rangka upaya optimalisasi pencapaian belanja daerah pada tahun 2025, maka beberapa tindakan Strategi Belanja yang menjadi perhatian antara lain:

1. Pelaksanaan belanja program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025.
2. Efektivitas dan transparansi Belanja Daerah, yaitu dengan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan memiliki keterkaitan langsung dengan prioritas pembangunan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Daerah, pendanaan arah kebijakan yang bersifat *mandatory*, pencapian standar pelayanan minimal, pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dengan mempertimbangkan aspek efesiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

3. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja, yaitu dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.
4. Belanja daerah dioptimalkan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran;
5. Belanja daerah yang bersifat pembangunan fisik segera diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
6. Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

7.2.8.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Secara umum Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, dengan maksud untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Berikut Rincian Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.2.30 Perbandingan Pembiayaan Daerah pada APBD dan Perubahan Pergeseran APBD TA 2025

URAIAN	APBD	PERUBAHAN PERGESERAN APBD	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4 = (3-2)	5 = (4/2*100)
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI	2.883.865.776.275,89	2.944.090.151.988,51	60.224.375.712,62	2,09
BELANJA MODAL	278.074.825.826,11	269.313.511.475,33	(8.761.314.350,78)	(3,15)
BELANJA TIDAK TERDUGA	109.748.000.000,00	2.281.396.903,60	(107.466.603.096,40)	(97,92)
BELANJA TRANSFER	646.953.680.261,00	716.816.050.533,00	69.862.370.272,00	10,8
JUMLAH BELANJA	**3.918.642.282.363,00**	**3.932.501.110.900,44**	**13.858.828.537,44**	**0,35**

Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada perubahan APBD tahun Anggaran 2025 berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang disesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, yakni dari sebelumnya sebesar 5.240.000.000,00 menjadi sebesar Rp27.286.164.438,01 atau mengalami kenaikan sebesar Rp22.046.164.438,01. Kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan pengeluaran pembiayaan mencakup penyertaan modal (Investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah kepada BUMD PT. Energi Kepri sebesar Rp5.000.000.000,00.

7.2.9. Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pencapaian target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 dapat terlihat pada indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan berdasarkan urusan pemerintahan

daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan membandingkan antara untuk melihat perbandingan target (anggaran) yang hendak dicapai dengan realisasinya sampai dengan periode 31 Desember 2025. Pada tahun anggaran 2025 Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp3.712.434.360.163,46 atau 94,94% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.910.214.946.462,43. Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp3.715.604.258.925,54 atau 94,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.932.501.110.900,44 sedangkan Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp27.291.476.128,01 atau 100,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.286.164.438,01 dan Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00.

7.2.9.1. Pencapaian Target Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp3.712.434.360.163,46 atau 94,94% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.910.214.946.462,43. Capaian realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 turun sebesar Rp245.861.001.099,22 atau sebesar 6,62% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.958.295.361.262,68. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi sebesar Rp1.736.336.133.204,89 atau sebesar 91,16% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.904.763.732.160,43. Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp1.974.299.383.024,00 atau 98,51% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp2.004.127.111.802,00, dan penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp1.798.843.934,57 atau 135,85% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.324.102.500,00. Secara ringkas realisasi pendapatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7.2.31 Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Periode 31 Desember 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	2025%	REALISASI 2024
1	2	3	4 = (3/2)*100	5
Pendapatan daerah				
Pendapatan asli daerah (pad)	1.904.763.732.160,43	1.736.336.133.204,89	91,15	1.980.461.763.464,68
Pendapatan transfer	2.004.127.111.802,00	1.974.299.383.024,00	98,51	1.976.533.066.207,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	1.324.102.500,00	1.798.843.934,57	135,85	1.300.531.591,00
Jumlah pendapatan	**3.910.214.946.462,43**	**3.712.434.360.163,46**	**94,94**	**3.958.295.361.262,68**

7.2.9.2. Pencapaian Target Kinerja Belanja Daerah

Indikator pencapaian target kinerja Belanja APBD dapat dicermati melalui optimalisasi capaian kinerja program. Berdasarkan APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp3.715.604.258.925,54 atau 94,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.932.501.110.900,44. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berasal dari belanja operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.779.255.950.571,38 dengan realisasi belanja operasi

sebesar Rp2.944.090.151.988,51 atau 94,40%. Belanja Modal yang terealisasi adalah sebesar Rp232.159.877.710,16 atau 86,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp269.313.511.475,33, Belanja Tidak Terduga tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp2.281.396.903,60 dikarenakan tidak ada peristiwa yang mengakibatkan adanya pengeluaran dari belanja tidak terduga. Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp704.188.430.644,00 atau sebesar 98,24% dari yang dianggarkan di APBD sebesar Rp716.816.050.533,00. Rincian realisasi Belanja per Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 7.2.32 Realisasi Belanja per Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Badan Kepegawaian dan KORPRI	19.316.741.138,00	18.762.730.608,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	41.636.034.038,00	180.159.124.503,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	754.777.212.470,95	838.836.392.279,31
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.962.203.403,00	10.566.225.571,36
5	Badan Pendapatan Daerah	106.733.268.335,75	115.930.186.890,20
6	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.129.768.952,00	6.876.027.694,00
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	15.325.213.721,00	15.453.682.273,00
8	Badan Penghubung Daerah	13.101.772.294,00	17.501.504.858,00
9	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	27.559.679.920,00	33.330.453.821,00
10	Biro Administrasi Pimpinan	6.000.053.714,00	11.743.835.725,00
11	Biro Hukum	1.766.563.869,00	2.889.204.096,00
12	Biro Kesejahteraan Rakyat	72.088.974.425,00	151.890.719.111,00
13	Biro Organisasi	881.263.370,00	1.887.569.891,00
14	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.596.935.967,00	4.212.198.024,00
15	Biro Pengadaan Barang/Jasa	1.357.399.816,00	2.285.150.268,00
16	Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.578.967.948,00	3.050.883.564,00
17	Biro Umum	176.665.178.765,05	190.718.403.762,23
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	37.517.314.104,93	21.134.203.211,41
19	Dinas Kebudayaan	14.057.867.362,31	17.608.163.887,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	52.349.880.797,92	67.666.654.729,83
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	30.825.231.377,04	38.551.923.977,00
22	Dinas Kesehatan	90.082.755.763,25	77.808.391.081,00
23	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	36.328.391.335,50	29.519.809.569,00
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	30.158.163.696,00	34.703.873.840,00
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	32.953.071.736,00	19.253.917.261,00
26	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	35.647.985.353,00	34.572.466.130,00
27	Dinas Pariwisata	20.400.695.006,00	26.240.716.090,00
28	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	102.786.972.764,14	144.785.962.994,61
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.213.903.273,00	16.101.580.906,00
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	25.691.508.379,00	22.140.867.693,91
31	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	14.805.451.792,00	14.748.383.021,00

No	Nama Perangkat Daerah	Tahun 2025	Tahun 2024
32	Dinas Pendidikan	997.834.211.343,38	1.049.194.472.692,20
33	Dinas Perhubungan	24.107.258.007,91	43.942.136.119,49
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27.641.990.133,00	21.743.998.917,00
35	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	20.425.168.247,40	19.569.485.147,02
36	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	183.780.153.764,82	155.084.552.494,00
37	Dinas Sosial	20.612.046.900,00	26.868.097.639,40
38	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	36.216.158.197,26	30.504.829.908,00
39	Inspektorat	49.818.552.697,00	45.517.169.676,00
40	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	140.443.480.779,00	91.682.849.607,00
41	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	262.650.041.010,93	251.836.588.613,32
42	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	24.832.206.577,00	23.604.127.694,00
43	Sekretariat DPRD	132.946.566.381,00	141.267.941.987,00
	Total	**3.715.604.258.925,54**	**4.071.747.457.825,29**

7.2.9.3. Pencapaian Target Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Selama Tahun Anggaran 2025 realisasi pembiayaan Netto Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terealisasi sebesar Rp22.291.476.128,01 atau 100,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.286.164.438,01. Untuk Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan rekening kas umum daerah yang perlu dibayar kembali. Pada tahun 2025 Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp27.291.476.128,01 atau 100,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.286.164.438,01. Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan yang terdiri dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp27.208.640.128,01 atau 99,72% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp27.286.164.438,01 dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya (Penarikan Dana Bergulir) sebesar Rp82.836.000,00 dari yang semula tidak dianggarkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberiaan pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu. Pada Tahun 2025 Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada PT. Energi Kepri (Perseroda) yang baru didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri. Terhadap penyertaan modal kepada PT. Energi Kepri (Perseroda) diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri. Rincian realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.2.33 Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	2025%	REALISASI 2024
1	2	3	4 = (3/2)*100	6
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	27.286.164.438,01	27.291.476.128,01	100,01	232.684.048.633,62
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	91.945.787.633,00
PEMBIAYAAN NETTO	**22.286.164.438,01**	**22.291.476.128,01**	**100,02**	**140.738.261.000,62**

7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

7.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp3.918.642.282.363,00 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Target Pendapatan Daerah pada APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah sebesar Rp3.918.402.282.363,00.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan perubahan APBD yang semula sebesar Rp3.918.642.282.363,00 menjadi sebesar Rp3.933.376.601.900,44 atau bertambah sebesar Rp14.734.319.537,44 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Target Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 menjadi sebesar Rp3.911.090.437.462,43 atau berkurang sebesar Rp7.311.844.900,57.

Selanjutnya dilakukan Pergeseran Penjabaran setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Target Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 menjadi Rp3.910.214.946.462,43 atau berkurang sebesar Rp875.491.000,00.

Secara keseluruhan jumlah realisasi Pendapatan Daerah tahun 2025 sebesar Rp3.712.434.360.163,46 atau sebesar 94,94% dari target yang ditetapkan dalam Perubahan APBD sebesar Rp3.910.214.946.462,43. Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp245.861.001.099,22 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2024 sebesar Rp3.958.295.361.262,68 atau sebesar 6,21%. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Alokasi Belanja Daerah Pergeseran Penjabaran setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.932.501.110.900,44 yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Alokasi Belanja Operasi tahun 2025 sebesar Rp2.944.090.151.988,51 yang digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp269.313.511.475,33 dan alokasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.281.396.903,60 serta Alokasi Belanja Transfer sebesar Rp716.816.050.533,00. Belanja Daerah tahun 2025 terealisasi sebesar Rp3.715.604.258.925,54 atau sebesar 94,48% dari nilai yang dianggarkan terhadap Belanja Daerah. Untuk Belanja Operasi tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.779.255.950.571,38 atau 94,40% dari nilai yang dianggarkan terhadap belanja operasi. Sedangkan Belanja Modal terealisasi sebesar Rp232.159.877.710,16 atau 86,20% dari nilai yang dianggarkan

terhadap Belanja Modal. Belanja Tidak Terduga tidak terealisasi sebesar dari nilai yang dianggarkan terhadap Belanja Tidak Terduga. Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp704.188.430.644,00 atau sebesar 98,24% dari nilai yang dianggarkan terhadap Belanja Transfer.

Adapun Pembiayaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp27.291.476.128,01 atau sebesar 100,02% dari dialokasikan sebesar Rp27.286.164.438,01. Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan yang terdiri dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp27.208.640.128,01 atau sebesar 99,72% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp27.286.164.438,01 dan Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat sebesar Rp82.836.000,00 dari yang semula tidak dianggarkan. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada PT. Energi Kepri (Perseroda) yang baru didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri. Terhadap penyertaan modal kepada PT. Energi Kepri (Perseroda) diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Tahun 2025:

Tabel 7.3.1 Realisasi APBD Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	3.910.214.946.462,43	3.712.434.360.163,46	94,94	3.958.295.361.262,68
	JUMLAH PENDAPATAN	3.910.214.946.462,43	3.712.434.360.163,46	94,94	3.958.295.361.262,68
5	BELANJA DAERAH	3.932.501.110.900,44	3.715.604.258.925,54	94,48	4.071.747.457.825,29
	JUMLAH BELANJA	3.932.501.110.900,44	3.715.604.258.925,54	94,48	4.071.747.457.825,29
	SURPLUS/DEFISIT	(22.286.164.438,01)	(3.169.898.762,08)	14,22	(113.452.096.562,61)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	22.286.164.438,01	22.291.476.128,01	100,02	140.738.261.000,62
	PEMBIAYAAN NETTO	22.286.164.438,01	22.291.476.128,01	100,02	140.738.261.000,62
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	19.121.577.365,93	0,00	27.286.164.438,01

7.3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang terkait adalah sebagai berikut:

Tabel 7.3.2 Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2025 menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	Pendapatan	3.910.214.946.462,43	3.712.434.360.163,46	(197.780.586.298,97)	94,94
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	169.667.392.499,00	170.204.845.951,57	537.453.452,57	100,32
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	5.790.864.500,00	4.117.064.995,00	(1.673.799.505,00)	71,10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan	5.790.864.500,00	4.117.064.995,00	(1.673.799.505,00)	71,10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	5.790.864.500,00	4.117.064.995,00	(1.673.799.505,00)	71,10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.790.864.500,00	4.117.064.995,00	(1.673.799.505,00)	71,10
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	163.501.527.999,00	165.557.111.956,57	2.055.583.957,57	101,26
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001		Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	140.001.527.999,00	144.774.215.484,57	4.772.687.485,57	103,41
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	140.001.527.999,00	144.774.215.484,57	4.772.687.485,57	103,41
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	140.001.527.999,00	144.774.215.484,57	4.772.687.485,57	103,41
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002		Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	23.500.000.000,00	20.782.896.472,00	(2.717.103.528,00)	88,44
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	4	PENDAPATAN DAERAH	23.500.000.000,00	20.782.896.472,00	(2.717.103.528,00)	88,44
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.500.000.000,00	20.782.896.472,00	(2.717.103.528,00)	88,44
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	375.000.000,00	530.669.000,00	155.669.000,00	141,51
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	375.000.000,00	530.669.000,00	155.669.000,00	141,51
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	375.000.000,00	530.669.000,00	155.669.000,00	141,51
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	375.000.000,00	530.669.000,00	155.669.000,00	141,51
2			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.516.431.893,24	4.414.762.602,00	898.330.708,76	125,55
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	221.133.000,00	118,43
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	221.133.000,00	118,43
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	221.133.000,00	118,43
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	221.133.000,00	118,43
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	131.350.000,00	245.965.833,00	114.615.833,00	187,26
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	131.350.000,00	245.965.833,00	114.615.833,00	187,26
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	131.350.000,00	245.965.833,00	114.615.833,00	187,26
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	131.350.000,00	245.965.833,00	114.615.833,00	187,26
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	300.000.000,00	475.000.000,00	175.000.000,00	158,33
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	300.000.000,00	475.000.000,00	175.000.000,00	158,33
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	300.000.000,00	475.000.000,00	175.000.000,00	158,33
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300.000.000,00	475.000.000,00	175.000.000,00	158,33
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1.885.081.893,24	2.272.663.769,00	387.581.875,76	120,56
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	1.885.081.893,24	2.272.663.769,00	387.581.875,76	120,56
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.885.081.893,24	2.272.663.769,00	387.581.875,76	120,56
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.885.081.893,24	2.272.663.769,00	387.581.875,76	120,56

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.021.079.565,00	878.508.535,00	(142.571.030,00)	86,04
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	936.448.400,00	878.508.535,00	(57.939.865,00)	93,81
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000		Dinas Kelautan dan Perikanan	936.448.400,00	878.508.535,00	(57.939.865,00)	93,81
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	936.448.400,00	878.508.535,00	(57.939.865,00)	93,81
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	936.448.400,00	878.508.535,00	(57.939.865,00)	93,81
3.29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	84.631.165,00	0,00	(84.631.165,00)	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	84.631.165,00	0,00	(84.631.165,00)	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	84.631.165,00	0,00	(84.631.165,00)	0,00
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	84.631.165,00	0,00	(84.631.165,00)	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.736.010.042.505,19	3.536.936.243.074,89	(199.073.799.430,30)	94,67
5.02			KEUANGAN	3.736.010.042.505,19	3.536.936.243.074,89	(199.073.799.430,30)	94,67
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000		Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.087.653.025.476,98	2.062.440.913.752,11	(25.212.111.724,87)	98,79
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.087.653.025.476,98	2.062.440.913.752,11	(25.212.111.724,87)	98,79
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	83.525.913.674,98	87.637.390.793,54	4.111.477.118,56	104,92
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.004.127.111.802,00	1.974.299.383.024,00	(29.827.728.778,00)	98,51
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	504.139.934,57	504.139.934,57	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000		Badan Pendapatan Daerah	1.648.357.017.028,21	1.474.491.221.665,62	(173.865.795.362,59)	89,45
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.648.357.017.028,21	1.474.491.221.665,62	(173.865.795.362,59)	89,45
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.647.032.914.528,21	1.473.196.517.665,62	(173.836.396.862,59)	89,45
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.324.102.500,00	1.294.704.000,00	(29.398.500,00)	97,78
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001		UPT Dana Bergulir	0,00	4.107.657,16	4.107.657,16	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	4.107.657,16	4.107.657,16	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	4.107.657,16	4.107.657,16	0,00
		5	Belanja	3.932.501.110.900,44	3.715.604.258.925,54	(216.896.851.974,90)	94,48
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.952.262.618.421,84	1.830.871.466.367,52	(121.391.152.054,32)	93,78
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.031.118.270.120,30	997.834.211.343,38	(33.284.058.776,92)	96,77
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan	1.029.314.069.493,50	996.378.647.544,52	(32.935.421.948,98)	96,80
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.029.314.069.493,50	996.378.647.544,52	(32.935.421.948,98)	96,80
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	942.643.690.564,17	919.338.372.032,51	(23.305.318.531,66)	97,53
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	86.670.378.929,33	77.040.275.512,01	(9.630.103.417,32)	88,89
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001		BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	1.486.232.818,80	1.300.289.250,86	(185.943.567,94)	87,49
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	1.486.232.818,80	1.300.289.250,86	(185.943.567,94)	87,49
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.363.766.618,80	1.223.213.450,86	(140.553.167,94)	89,69
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	122.466.200,00	77.075.800,00	(45.390.400,00)	62,94

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002		CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM	70.658.108,00	63.868.551,00	(6.789.557,00)	90,39
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	70.658.108,00	63.868.551,00	(6.789.557,00)	90,39
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	70.658.108,00	63.868.551,00	(6.789.557,00)	90,39
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003		CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN	66.177.200,00	27.599.000,00	(38.578.200,00)	41,70
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	66.177.200,00	27.599.000,00	(38.578.200,00)	41,70
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	66.177.200,00	27.599.000,00	(38.578.200,00)	41,70
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004		CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA	61.460.000,00	32.131.000,00	(29.329.000,00)	52,28
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	61.460.000,00	32.131.000,00	(29.329.000,00)	52,28
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	60.807.900,00	32.131.000,00	(28.676.900,00)	52,84
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	652.100,00	0,00	(652.100,00)	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005		CABANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA	61.798.500,00	21.797.597,00	(40.000.903,00)	35,27
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	61.798.500,00	21.797.597,00	(40.000.903,00)	35,27
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	61.136.100,00	21.797.597,00	(39.338.503,00)	35,65
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	662.400,00	0,00	(662.400,00)	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006		CABANG DINAS PENDIDIKAN KAB. KEP ANAMBAS	57.874.000,00	9.878.400,00	(47.995.600,00)	17,07
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	5	BELANJA DAERAH	57.874.000,00	9.878.400,00	(47.995.600,00)	17,07
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	57.874.000,00	9.878.400,00	(47.995.600,00)	17,07
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	510.494.769.886,54	493.176.277.553,18	(17.318.492.333,36)	96,61
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		Dinas Kesehatan	90.194.025.364,54	83.968.182.079,00	(6.225.843.285,54)	93,10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	90.194.025.364,54	83.968.182.079,00	(6.225.843.285,54)	93,10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	71.203.468.664,54	65.396.284.640,00	(5.807.184.024,54)	91,84
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	18.990.556.700,00	18.571.897.439,00	(418.659.261,00)	97,80
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001		Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	266.643.813.304,00	262.650.041.010,93	(3.993.772.293,07)	98,50
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5	BELANJA DAERAH	266.643.813.304,00	262.650.041.010,93	(3.993.772.293,07)	98,50
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	257.387.351.565,00	253.868.136.957,93	(3.519.214.607,07)	98,63
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	9.256.461.739,00	8.781.904.053,00	(474.557.686,00)	94,87
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002		Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	146.827.835.328,00	140.443.480.779,00	(6.384.354.549,00)	95,65
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5	BELANJA DAERAH	146.827.835.328,00	140.443.480.779,00	(6.384.354.549,00)	95,65
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	89.356.447.778,00	85.610.362.979,00	(3.746.084.799,00)	95,81
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	57.471.387.550,00	54.833.117.800,00	(2.638.269.750,00)	95,41
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004		UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)	6.829.095.890,00	6.114.573.684,25	(714.522.205,75)	89,54
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	5	BELANJA DAERAH	6.829.095.890,00	6.114.573.684,25	(714.522.205,75)	89,54
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.508.657.400,00	5.794.135.194,25	(714.522.205,75)	89,02
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	320.438.490,00	320.438.490,00	0,00	100,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	137.030.002.320,00	101.674.366.826,14	(35.355.635.493,86)	74,20

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	131.962.568.111,00	97.169.623.145,14	(34.792.944.965,86)	73,63
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	131.962.568.111,00	97.169.623.145,14	(34.792.944.965,86)	73,63
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	103.244.227.441,00	76.751.740.698,25	(26.492.486.742,75)	74,34
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	28.718.340.670,00	20.417.882.446,89	(8.300.458.223,11)	71,10
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002		UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	4.179.166.841,00	3.704.030.412,00	(475.136.429,00)	88,63
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	5	BELANJA DAERAH	4.179.166.841,00	3.704.030.412,00	(475.136.429,00)	88,63
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.467.014.341,00	2.016.798.538,00	(450.215.803,00)	81,75
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.712.152.500,00	1.687.231.874,00	(24.920.626,00)	98,54
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN	888.267.368,00	800.713.269,00	(87.554.099,00)	90,14
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	5	BELANJA DAERAH	888.267.368,00	800.713.269,00	(87.554.099,00)	90,14
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	880.794.668,00	793.278.269,00	(87.516.399,00)	90,06
1.03	1.03.2.10.0.00.03.0001	5.2	BELANJA MODAL	7.472.700,00	7.435.000,00	(37.700,00)	99,50
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	216.020.164.204,00	183.780.153.764,82	(32.240.010.439,18)	85,08
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	216.020.164.204,00	183.780.153.764,82	(32.240.010.439,18)	85,08
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	216.020.164.204,00	183.780.153.764,82	(32.240.010.439,18)	85,08
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	212.723.271.104,00	181.560.380.352,82	(31.162.890.751,18)	85,35
1.04	1.04.0.00.0.00.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.296.893.100,00	2.219.773.412,00	(1.077.119.688,00)	67,33
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	34.886.351.384,00	33.794.409.980,00	(1.091.941.404,00)	96,87
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	25.677.685.026,00	24.832.206.577,00	(845.478.449,00)	96,71
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	25.677.685.026,00	24.832.206.577,00	(845.478.449,00)	96,71
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	25.282.039.326,00	24.462.373.577,00	(819.665.749,00)	96,76
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	395.645.700,00	369.833.000,00	(25.812.700,00)	93,48
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.208.666.358,00	8.962.203.403,00	(246.462.955,00)	97,32
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	9.208.666.358,00	8.962.203.403,00	(246.462.955,00)	97,32
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.160.501.253,40	8.914.539.904,00	(245.961.349,40)	97,31
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	48.165.104,60	47.663.499,00	(501.605,60)	98,96
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	22.713.060.507,00	20.612.046.900,00	(2.101.013.607,00)	90,75
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000		Dinas Sosial	22.713.060.507,00	20.612.046.900,00	(2.101.013.607,00)	90,75
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	5	BELANJA DAERAH	22.713.060.507,00	20.612.046.900,00	(2.101.013.607,00)	90,75
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	5.1	BELANJA OPERASI	22.375.289.665,00	20.291.157.330,00	(2.084.132.335,00)	90,69
1.06	1.06.0.00.0.00.06.0000	5.2	BELANJA MODAL	337.770.842,00	320.889.570,00	(16.881.272,00)	95,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	331.518.291.825,79	302.656.927.957,92	(28.861.363.867,87)	91,29
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	37.958.769.556,00	36.165.860.057,26	(1.792.909.498,74)	95,28

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	32.012.474.766,00	30.696.103.105,26	(1.316.371.660,74)	95,89
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	5	BELANJA DAERAH	32.012.474.766,00	30.696.103.105,26	(1.316.371.660,74)	95,89
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	5.1	BELANJA OPERASI	31.676.204.366,00	30.478.585.654,26	(1.197.618.711,74)	96,22
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0000	5.2	BELANJA MODAL	336.270.400,00	217.517.451,00	(118.752.949,00)	64,69
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002		UPTD BLK Provinsi Kepulauan Riau	5.371.959.410,00	4.984.411.831,00	(387.547.579,00)	92,79
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	5	BELANJA DAERAH	5.371.959.410,00	4.984.411.831,00	(387.547.579,00)	92,79
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.359.176.157,00	4.035.005.382,00	(324.170.775,00)	92,56
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.012.783.253,00	949.406.449,00	(63.376.804,00)	93,74
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003		UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun	40.331.230,00	36.760.966,00	(3.570.264,00)	91,15
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003	5	BELANJA DAERAH	40.331.230,00	36.760.966,00	(3.570.264,00)	91,15
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0003	5.1	BELANJA OPERASI	40.331.230,00	36.760.966,00	(3.570.264,00)	91,15
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001		UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam	534.004.150,00	448.584.155,00	(85.419.995,00)	84,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	5	BELANJA DAERAH	534.004.150,00	448.584.155,00	(85.419.995,00)	84,00
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	367.795.950,00	333.379.155,00	(34.416.795,00)	90,64
2.07	2.07.3.32.0.00.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	166.208.200,00	115.205.000,00	(51.003.200,00)	69,31
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	21.900.477.218,00	20.199.282.663,00	(1.701.194.555,00)	92,23
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	16.853.149.770,00	15.822.657.174,00	(1.030.492.596,00)	93,89
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	5	BELANJA DAERAH	16.853.149.770,00	15.822.657.174,00	(1.030.492.596,00)	93,89
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	5.1	BELANJA OPERASI	16.731.892.970,00	15.702.259.974,00	(1.029.632.996,00)	93,85
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0000	5.2	BELANJA MODAL	121.256.800,00	120.397.200,00	(859.600,00)	99,29
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001		UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	5.047.327.448,00	4.376.625.489,00	(670.701.959,00)	86,71
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	5	BELANJA DAERAH	5.047.327.448,00	4.376.625.489,00	(670.701.959,00)	86,71
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	926.697.366,00	839.156.399,00	(87.540.967,00)	90,55
2.08	2.08.2.14.0.00.08.0001	5.2	BELANJA MODAL	4.120.630.082,00	3.537.469.090,00	(583.160.992,00)	85,85
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	26.263.998.288,02	24.752.290.564,00	(1.511.707.724,02)	94,24
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	25.596.672.767,98	24.111.486.206,00	(1.485.186.561,98)	94,20
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	5	BELANJA DAERAH	25.596.672.767,98	24.111.486.206,00	(1.485.186.561,98)	94,20
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.1	BELANJA OPERASI	24.763.288.797,98	23.439.789.445,00	(1.323.499.352,98)	94,66
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.2	BELANJA MODAL	833.383.970,00	671.696.761,00	(161.687.209,00)	80,60
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0002		UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan	316.666.078,00	306.974.039,00	(9.692.039,00)	96,94
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0002	5	BELANJA DAERAH	316.666.078,00	306.974.039,00	(9.692.039,00)	96,94
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	316.666.078,00	306.974.039,00	(9.692.039,00)	96,94
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0001		UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan	350.659.442,04	333.830.319,00	(16.829.123,04)	95,20

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
			Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)				
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0001	5	BELANJA DAERAH	350.659.442,04	333.830.319,00	(16.829.123,04)	95,20
2.09	2.09.3.27.0.00.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	350.659.442,04	333.830.319,00	(16.829.123,04)	95,20
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1.145.804.044,00	1.112.605.938,00	(33.198.106,00)	97,10
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.145.804.044,00	1.112.605.938,00	(33.198.106,00)	97,10
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	1.145.804.044,00	1.112.605.938,00	(33.198.106,00)	97,10
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	145.804.044,00	120.505.938,00	(25.298.106,00)	82,65
2.10	1.03.2.10.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	992.100.000,00	(7.900.000,00)	99,21
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	35.294.444.739,00	33.388.547.528,00	(1.905.897.211,00)	94,60
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	34.409.483.798,00	32.816.455.454,00	(1.593.028.344,00)	95,37
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	5	BELANJA DAERAH	34.409.483.798,00	32.816.455.454,00	(1.593.028.344,00)	95,37
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	5.1	BELANJA OPERASI	33.483.995.918,00	32.476.617.054,00	(1.007.378.864,00)	96,99
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0000	5.2	BELANJA MODAL	925.487.880,00	339.838.400,00	(585.649.480,00)	36,72
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002		UPTD KPHP Unit I Karimun	34.566.300,00	29.176.820,00	(5.389.480,00)	84,41
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002	5	BELANJA DAERAH	34.566.300,00	29.176.820,00	(5.389.480,00)	84,41
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.566.300,00	29.176.820,00	(5.389.480,00)	84,41
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004		UPTD KPHP Unit III Lingga	22.793.624,00	21.482.629,00	(1.310.995,00)	94,25
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004	5	BELANJA DAERAH	22.793.624,00	21.482.629,00	(1.310.995,00)	94,25
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0004	5.1	BELANJA OPERASI	22.793.624,00	21.482.629,00	(1.310.995,00)	94,25
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005		UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang	42.167.480,00	40.914.300,00	(1.253.180,00)	97,03
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005	5	BELANJA DAERAH	42.167.480,00	40.914.300,00	(1.253.180,00)	97,03
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0005	5.1	BELANJA OPERASI	42.167.480,00	40.914.300,00	(1.253.180,00)	97,03
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006		UPTD KPHP Unit V Natuna	48.072.000,00	45.272.230,00	(2.799.770,00)	94,18
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006	5	BELANJA DAERAH	48.072.000,00	45.272.230,00	(2.799.770,00)	94,18
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0006	5.1	BELANJA OPERASI	48.072.000,00	45.272.230,00	(2.799.770,00)	94,18
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007		UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas	99.685.100,00	98.583.380,00	(1.101.720,00)	98,89
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007	5	BELANJA DAERAH	99.685.100,00	98.583.380,00	(1.101.720,00)	98,89
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0007	5.1	BELANJA OPERASI	99.685.100,00	98.583.380,00	(1.101.720,00)	98,89
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003		UPTD KPHP Unit II Batam	25.596.000,00	23.020.320,00	(2.575.680,00)	89,94
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	5	BELANJA DAERAH	25.596.000,00	23.020.320,00	(2.575.680,00)	89,94
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.596.000,00	23.020.320,00	(2.575.680,00)	89,94
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001		UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	612.080.437,00	313.642.395,00	(298.438.042,00)	51,24
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	5	BELANJA DAERAH	612.080.437,00	313.642.395,00	(298.438.042,00)	51,24
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	347.733.850,00	184.786.935,00	(162.946.915,00)	53,14
2.11	2.11.3.28.0.00.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	264.346.587,00	128.855.460,00	(135.491.127,00)	48,74

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11.989.281.374,00	11.792.071.314,00	(197.210.060,00)	98,36
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.989.281.374,00	11.792.071.314,00	(197.210.060,00)	98,36
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	5	BELANJA DAERAH	11.989.281.374,00	11.792.071.314,00	(197.210.060,00)	98,36
2.12	2.12.2.13.0.00.11.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.989.281.374,00	11.792.071.314,00	(197.210.060,00)	98,36
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.780.225.896,00	2.421.831.959,00	(358.393.937,00)	87,11
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.780.225.896,00	2.421.831.959,00	(358.393.937,00)	87,11
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	5	BELANJA DAERAH	2.780.225.896,00	2.421.831.959,00	(358.393.937,00)	87,11
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.765.649.896,00	2.407.255.959,00	(358.393.937,00)	87,04
2.13	2.12.2.13.0.00.11.0000	5.2	BELANJA MODAL	14.576.000,00	14.576.000,00	0,00	100,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.585.490.080,00	5.492.225.716,00	(93.264.364,00)	98,33
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	5.585.490.080,00	5.492.225.716,00	(93.264.364,00)	98,33
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	5	BELANJA DAERAH	5.585.490.080,00	5.492.225.716,00	(93.264.364,00)	98,33
2.14	2.08.2.14.0.00.08.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.585.490.080,00	5.492.225.716,00	(93.264.364,00)	98,33
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	29.737.235.569,00	24.107.258.007,91	(5.629.977.561,09)	81,07
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	28.329.047.664,69	22.936.502.634,91	(5.392.545.029,78)	80,96
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	28.329.047.664,69	22.936.502.634,91	(5.392.545.029,78)	80,96
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	21.714.827.054,69	19.652.203.492,14	(2.062.623.562,55)	90,50
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	6.614.220.610,00	3.284.299.142,77	(3.329.921.467,23)	49,66
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam	114.399.328,19	99.221.706,00	(15.177.622,19)	86,73
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	114.399.328,19	99.221.706,00	(15.177.622,19)	86,73
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	109.996.428,19	99.221.706,00	(10.774.722,19)	90,20
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	4.402.900,00	0,00	(4.402.900,00)	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun	246.839.950,00	214.199.484,00	(32.640.466,00)	86,78
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	246.839.950,00	214.199.484,00	(32.640.466,00)	86,78
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	224.669.844,00	199.571.684,00	(25.098.160,00)	88,83
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	22.170.106,00	14.627.800,00	(7.542.306,00)	65,98
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	489.378.780,00	436.370.051,00	(53.008.729,00)	89,17
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	489.378.780,00	436.370.051,00	(53.008.729,00)	89,17
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	489.378.780,00	436.370.051,00	(53.008.729,00)	89,17
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepualauan Anambas	373.159.177,12	267.638.877,00	(105.520.300,12)	71,72
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	373.159.177,12	267.638.877,00	(105.520.300,12)	71,72

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	357.239.777,12	252.485.157,00	(104.754.620,12)	70,68
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	15.919.400,00	15.153.720,00	(765.680,00)	95,19
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005		UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga	184.410.669,00	153.325.255,00	(31.085.414,00)	83,14
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	184.410.669,00	153.325.255,00	(31.085.414,00)	83,14
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	184.410.669,00	153.325.255,00	(31.085.414,00)	83,14
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	34.881.878.468,00	30.096.474.805,00	(4.785.403.663,00)	86,28
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	34.881.878.468,00	30.096.474.805,00	(4.785.403.663,00)	86,28
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	5	BELANJA DAERAH	34.881.878.468,00	30.096.474.805,00	(4.785.403.663,00)	86,28
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	5.1	BELANJA OPERASI	34.640.775.718,00	29.861.076.806,00	(4.779.698.912,00)	86,20
2.16	2.16.2.20.2.21.13.0000	5.2	BELANJA MODAL	241.102.750,00	235.397.999,00	(5.704.751,00)	97,63
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	38.427.480.191,00	32.953.071.736,00	(5.474.408.455,00)	85,75
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	38.427.480.191,00	32.953.071.736,00	(5.474.408.455,00)	85,75
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	5	BELANJA DAERAH	38.427.480.191,00	32.953.071.736,00	(5.474.408.455,00)	85,75
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	5.1	BELANJA OPERASI	38.349.762.491,00	32.882.770.633,00	(5.466.991.858,00)	85,74
2.17	2.17.0.00.0.00.14.0000	5.2	BELANJA MODAL	77.717.700,00	70.301.103,00	(7.416.597,00)	90,46
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	15.071.210.290,00	14.805.451.792,00	(265.758.498,00)	98,24
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	15.071.210.290,00	14.805.451.792,00	(265.758.498,00)	98,24
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	5	BELANJA DAERAH	15.071.210.290,00	14.805.451.792,00	(265.758.498,00)	98,24
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	5.1	BELANJA OPERASI	15.059.581.359,00	14.793.891.142,00	(265.690.217,00)	98,24
2.18	2.18.0.00.0.00.15.0000	5.2	BELANJA MODAL	11.628.931,00	11.560.650,00	(68.281,00)	99,41
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	34.233.552.898,77	30.825.231.377,04	(3.408.321.521,73)	90,04
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	34.233.552.898,77	30.825.231.377,04	(3.408.321.521,73)	90,04
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	5	BELANJA DAERAH	34.233.552.898,77	30.825.231.377,04	(3.408.321.521,73)	90,04
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	5.1	BELANJA OPERASI	33.919.033.698,77	30.669.251.377,04	(3.249.782.321,73)	90,42
2.19	2.19.0.00.0.00.16.0000	5.2	BELANJA MODAL	314.519.200,00	155.980.000,00	(158.539.200,00)	49,59
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	48.595.643,00	38.441.840,00	(10.153.803,00)	79,11
2.20	2.16.2.20.2.21.13.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	48.595.643,00	38.441.840,00	(10.153.803,00)	79,11
2.20	2.16.2.20.2.21.13.0000	5	BELANJA DAERAH	48.595.643,00	38.441.840,00	(10.153.803,00)	79,11
2.20	2.16.2.20.2.21.13.0000	5.1	BELANJA OPERASI	48.595.643,00	38.441.840,00	(10.153.803,00)	79,11
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	36.231.702,00	23.247.051,00	(12.984.651,00)	64,16
2.21	2.16.2.20.2.21.13.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	36.231.702,00	23.247.051,00	(12.984.651,00)	64,16
2.21	2.16.2.20.2.21.13.0000	5	BELANJA DAERAH	36.231.702,00	23.247.051,00	(12.984.651,00)	64,16
2.21	2.16.2.20.2.21.13.0000	5.1	BELANJA OPERASI	36.231.702,00	23.247.051,00	(12.984.651,00)	64,16
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	14.725.421.971,00	14.057.867.362,31	(667.554.608,69)	95,47
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000		Dinas Kebudayaan	14.725.421.971,00	14.057.867.362,31	(667.554.608,69)	95,47

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	5	BELANJA DAERAH	14.725.421.971,00	14.057.867.362,31	(667.554.608,69)	95,47
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	5.1	BELANJA OPERASI	14.600.421.971,00	13.932.881.362,31	(667.540.608,69)	95,43
2.22	2.22.0.00.0.00.17.0000	5.2	BELANJA MODAL	125.000.000,00	124.986.000,00	(14.000,00)	99,99
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	21.308.335.398,00	20.310.524.816,40	(997.810.581,60)	95,32
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000		Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	21.135.767.072,00	20.148.974.850,40	(986.792.221,60)	95,33
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	5	BELANJA DAERAH	21.135.767.072,00	20.148.974.850,40	(986.792.221,60)	95,33
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	5.1	BELANJA OPERASI	20.774.283.722,00	19.948.806.115,40	(825.477.606,60)	96,03
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	5.2	BELANJA MODAL	361.483.350,00	200.168.735,00	(161.314.615,00)	55,37
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001		UPT Perpustakaan Muhammad Sani	172.568.326,00	161.549.966,00	(11.018.360,00)	93,62
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	5	BELANJA DAERAH	172.568.326,00	161.549.966,00	(11.018.360,00)	93,62
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0001	5.1	BELANJA OPERASI	172.568.326,00	161.549.966,00	(11.018.360,00)	93,62
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	129.858.500,00	114.643.431,00	(15.215.069,00)	88,28
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000		Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	129.858.500,00	114.643.431,00	(15.215.069,00)	88,28
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	5	BELANJA DAERAH	129.858.500,00	114.643.431,00	(15.215.069,00)	88,28
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	5.1	BELANJA OPERASI	129.858.500,00	114.643.431,00	(15.215.069,00)	88,28
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	170.633.523.694,98	151.795.716.778,35	(18.837.806.916,63)	88,96
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	54.164.879.734,00	52.349.880.797,92	(1.814.998.936,08)	96,65
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000		Dinas Kelautan dan Perikanan	49.191.754.015,02	47.509.662.635,12	(1.682.091.379,90)	96,58
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	5	BELANJA DAERAH	49.191.754.015,02	47.509.662.635,12	(1.682.091.379,90)	96,58
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	5.1	BELANJA OPERASI	48.992.565.575,02	47.312.392.579,12	(1.680.172.995,90)	96,57
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0000	5.2	BELANJA MODAL	199.188.440,00	197.270.056,00	(1.918.384,00)	99,04
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas	183.961.787,00	183.820.287,00	(141.500,00)	99,92
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	5	BELANJA DAERAH	183.961.787,00	183.820.287,00	(141.500,00)	99,92
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0001	5.1	BELANJA OPERASI	183.961.787,00	183.820.287,00	(141.500,00)	99,92
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna	352.718.091,00	337.298.144,00	(15.419.947,00)	95,63
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	5	BELANJA DAERAH	352.718.091,00	337.298.144,00	(15.419.947,00)	95,63
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	5.1	BELANJA OPERASI	340.968.091,00	325.548.144,00	(15.419.947,00)	95,48
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0002	5.2	BELANJA MODAL	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	100,00
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga	277.966.003,00	262.572.999,00	(15.393.004,00)	94,46
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	5	BELANJA DAERAH	277.966.003,00	262.572.999,00	(15.393.004,00)	94,46
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0003	5.1	BELANJA OPERASI	277.966.003,00	262.572.999,00	(15.393.004,00)	94,46
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun	715.032.898,00	707.765.755,00	(7.267.143,00)	98,98
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	5	BELANJA DAERAH	715.032.898,00	707.765.755,00	(7.267.143,00)	98,98
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0004	5.1	BELANJA OPERASI	715.032.898,00	707.765.755,00	(7.267.143,00)	98,98
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005		Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam	614.694.905,00	597.523.451,00	(17.171.454,00)	97,21

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	5	BELANJA DAERAH	614.694.905,00	597.523.451,00	(17.171.454,00)	97,21
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0005	5.1	BELANJA OPERASI	614.694.905,00	597.523.451,00	(17.171.454,00)	97,21
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008		UPTD Balai Benih Ikan	1.568.568.659,00	1.556.452.354,80	(12.116.304,20)	99,23
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	5	BELANJA DAERAH	1.568.568.659,00	1.556.452.354,80	(12.116.304,20)	99,23
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.451.447.959,00	1.440.475.939,80	(10.972.019,20)	99,24
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0008	5.2	BELANJA MODAL	117.120.700,00	115.976.415,00	(1.144.285,00)	99,02
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007		UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMP2KP)	531.807.178,98	517.952.898,00	(13.854.280,98)	97,39
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	5	BELANJA DAERAH	531.807.178,98	517.952.898,00	(13.854.280,98)	97,39
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	5.1	BELANJA OPERASI	502.057.678,98	490.804.518,00	(11.253.160,98)	97,76
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0007	5.2	BELANJA MODAL	29.749.500,00	27.148.380,00	(2.601.120,00)	91,26
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006		UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai	728.376.197,00	676.832.274,00	(51.543.923,00)	92,92
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	5	BELANJA DAERAH	728.376.197,00	676.832.274,00	(51.543.923,00)	92,92
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	5.1	BELANJA OPERASI	725.570.197,00	676.832.274,00	(48.737.923,00)	93,28
3.25	3.25.0.00.0.00.19.0006	5.2	BELANJA MODAL	2.806.000,00	0,00	(2.806.000,00)	0,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	23.086.667.902,00	20.400.695.006,00	(2.685.972.896,00)	88,37
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata	23.086.667.902,00	20.400.695.006,00	(2.685.972.896,00)	88,37
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	23.086.667.902,00	20.400.695.006,00	(2.685.972.896,00)	88,37
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	23.086.667.902,00	20.400.695.006,00	(2.685.972.896,00)	88,37
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	15.925.730.686,98	11.576.100.771,50	(4.349.629.915,48)	72,69
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	14.656.023.713,00	10.515.509.884,50	(4.140.513.828,50)	71,75
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	5	BELANJA DAERAH	14.656.023.713,00	10.515.509.884,50	(4.140.513.828,50)	71,75
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.1	BELANJA OPERASI	14.639.198.713,00	10.498.684.884,50	(4.140.513.828,50)	71,72
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0000	5.2	BELANJA MODAL	16.825.000,00	16.825.000,00	0,00	100,00
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002		UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan	299.694.799,00	142.680.631,00	(157.014.168,00)	47,61
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	5	BELANJA DAERAH	299.694.799,00	142.680.631,00	(157.014.168,00)	47,61
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	299.694.799,00	142.680.631,00	(157.014.168,00)	47,61
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001		UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)	970.012.174,98	917.910.256,00	(52.101.918,98)	94,63
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	5	BELANJA DAERAH	970.012.174,98	917.910.256,00	(52.101.918,98)	94,63
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	966.117.628,98	914.016.376,00	(52.101.252,98)	94,61
3.27	2.09.3.27.0.00.09.0001	5.2	BELANJA MODAL	3.894.546,00	3.893.880,00	(666,00)	99,98
3.28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	2.592.141.510,00	2.259.437.825,00	(332.703.685,00)	87,16
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.409.501.550,00	1.279.501.967,00	(129.999.583,00)	90,78
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	5	BELANJA DAERAH	1.409.501.550,00	1.279.501.967,00	(129.999.583,00)	90,78

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.409.501.550,00	1.279.501.967,00	(129.999.583,00)	90,78
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0002		UPTD KPHP Unit I Karimun	162.557.297,00	131.195.000,00	(31.362.297,00)	80,71
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0002	5	BELANJA DAERAH	162.557.297,00	131.195.000,00	(31.362.297,00)	80,71
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0002	5.1	BELANJA OPERASI	162.557.297,00	131.195.000,00	(31.362.297,00)	80,71
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0004		UPTD KPHP Unit III Lingga	166.409.999,00	162.477.918,00	(3.932.081,00)	97,64
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0004	5	BELANJA DAERAH	166.409.999,00	162.477.918,00	(3.932.081,00)	97,64
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0004	5.1	BELANJA OPERASI	166.409.999,00	162.477.918,00	(3.932.081,00)	97,64
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0005		UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang	207.155.503,00	203.457.055,00	(3.698.448,00)	98,21
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0005	5	BELANJA DAERAH	207.155.503,00	203.457.055,00	(3.698.448,00)	98,21
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0005	5.1	BELANJA OPERASI	207.155.503,00	203.457.055,00	(3.698.448,00)	98,21
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0006		UPTD KPHP Unit V Natuna	264.794.131,00	157.323.835,00	(107.470.296,00)	59,41
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0006	5	BELANJA DAERAH	264.794.131,00	157.323.835,00	(107.470.296,00)	59,41
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0006	5.1	BELANJA OPERASI	264.794.131,00	157.323.835,00	(107.470.296,00)	59,41
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0007		UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas	182.509.245,00	127.220.750,00	(55.288.495,00)	69,71
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0007	5	BELANJA DAERAH	182.509.245,00	127.220.750,00	(55.288.495,00)	69,71
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0007	5.1	BELANJA OPERASI	182.509.245,00	127.220.750,00	(55.288.495,00)	69,71
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0003		UPTD KPHP Unit II Batam	199.213.785,00	198.261.300,00	(952.485,00)	99,52
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0003	5	BELANJA DAERAH	199.213.785,00	198.261.300,00	(952.485,00)	99,52
3.28	2.11.3.28.0.00.10.0003	5.1	BELANJA OPERASI	199.213.785,00	198.261.300,00	(952.485,00)	99,52
3.29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	46.006.620.418,00	37.517.314.104,93	(8.489.306.313,07)	81,55
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	46.006.620.418,00	37.517.314.104,93	(8.489.306.313,07)	81,55
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	5	BELANJA DAERAH	46.006.620.418,00	37.517.314.104,93	(8.489.306.313,07)	81,55
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	5.1	BELANJA OPERASI	20.213.031.936,00	19.019.092.983,44	(1.193.938.952,56)	94,09
3.29	3.29.0.00.0.00.20.0000	5.2	BELANJA MODAL	25.793.588.482,00	18.498.221.121,49	(7.295.367.360,51)	71,72
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	21.295.837.371,00	20.402.503.487,00	(893.333.884,00)	95,81
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.295.837.371,00	20.402.503.487,00	(893.333.884,00)	95,81
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	5	BELANJA DAERAH	21.295.837.371,00	20.402.503.487,00	(893.333.884,00)	95,81
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	5.1	BELANJA OPERASI	20.082.666.421,00	19.270.128.037,00	(812.538.384,00)	95,95
3.30	3.30.3.31.0.00.21.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.213.170.950,00	1.132.375.450,00	(80.795.500,00)	93,34
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	7.511.099.193,00	7.239.486.646,00	(271.612.547,00)	96,38
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.511.099.193,00	7.239.486.646,00	(271.612.547,00)	96,38
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	5	BELANJA DAERAH	7.511.099.193,00	7.239.486.646,00	(271.612.547,00)	96,38
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.364.554.793,00	7.100.815.667,00	(263.739.126,00)	96,42
3.31	3.30.3.31.0.00.21.0000	5.2	BELANJA MODAL	146.544.400,00	138.670.979,00	(7.873.421,00)	94,63
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	50.546.880,00	50.298.140,00	(248.740,00)	99,51

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	50.546.880,00	50.298.140,00	(248.740,00)	99,51
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000	5	BELANJA DAERAH	50.546.880,00	50.298.140,00	(248.740,00)	99,51
3.32	2.07.3.32.0.00.07.0000	5.1	BELANJA OPERASI	50.546.880,00	50.298.140,00	(248.740,00)	99,51
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	412.405.594.967,79	395.881.904.255,05	(16.523.690.712,74)	95,99
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	274.937.981.388,79	262.935.337.874,05	(12.002.643.514,74)	95,63
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.674.150.158,93	2.596.935.967,00	(77.214.191,93)	97,11
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	5	BELANJA DAERAH	2.674.150.158,93	2.596.935.967,00	(77.214.191,93)	97,11
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.668.861.542,93	2.592.545.967,00	(76.315.575,93)	97,14
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0002	5.2	BELANJA MODAL	5.288.616,00	4.390.000,00	(898.616,00)	83,01
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004		Biro Kesejahteraan Rakyat	76.117.790.635,58	72.088.974.425,00	(4.028.816.210,58)	94,71
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	5	BELANJA DAERAH	76.117.790.635,58	72.088.974.425,00	(4.028.816.210,58)	94,71
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	5.1	BELANJA OPERASI	76.056.131.911,58	72.028.923.425,00	(4.027.208.486,58)	94,70
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0004	5.2	BELANJA MODAL	61.658.724,00	60.051.000,00	(1.607.724,00)	97,39
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001		Biro Hukum	1.907.268.509,00	1.766.563.869,00	(140.704.640,00)	92,62
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	5	BELANJA DAERAH	1.907.268.509,00	1.766.563.869,00	(140.704.640,00)	92,62
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.814.497.209,00	1.704.091.319,00	(110.405.890,00)	93,92
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0001	5.2	BELANJA MODAL	92.771.300,00	62.472.550,00	(30.298.750,00)	67,34
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005		Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.696.019.757,25	1.578.967.948,00	(117.051.809,25)	93,10
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	5	BELANJA DAERAH	1.696.019.757,25	1.578.967.948,00	(117.051.809,25)	93,10
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.691.569.257,25	1.574.583.448,00	(116.985.809,25)	93,08
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0005	5.2	BELANJA MODAL	4.450.500,00	4.384.500,00	(66.000,00)	98,52
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008		Biro Pengadaan Barang/Jasa	1.402.420.130,00	1.357.399.816,00	(45.020.314,00)	96,79
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	5	BELANJA DAERAH	1.402.420.130,00	1.357.399.816,00	(45.020.314,00)	96,79
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.372.722.384,00	1.335.416.266,00	(37.306.118,00)	97,28
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0008	5.2	BELANJA MODAL	29.697.746,00	21.983.550,00	(7.714.196,00)	74,02
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006		Biro Umum	184.113.876.278,00	176.665.178.765,05	(7.448.697.512,95)	95,95
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	5	BELANJA DAERAH	184.113.876.278,00	176.665.178.765,05	(7.448.697.512,95)	95,95
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	5.1	BELANJA OPERASI	177.436.020.478,00	170.414.252.621,05	(7.021.767.856,95)	96,04
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0006	5.2	BELANJA MODAL	6.677.855.800,00	6.250.926.144,00	(426.929.656,00)	93,61
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007		Biro Administrasi Pimpinan	6.098.561.124,40	6.000.053.714,00	(98.507.410,40)	98,38
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	5	BELANJA DAERAH	6.098.561.124,40	6.000.053.714,00	(98.507.410,40)	98,38
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.078.118.124,40	5.979.611.120,00	(98.507.004,40)	98,38
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0007	5.2	BELANJA MODAL	20.443.000,00	20.442.594,00	(406,00)	100,00
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003		Biro Organisasi	927.894.795,63	881.263.370,00	(46.631.425,63)	94,97
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	5	BELANJA DAERAH	927.894.795,63	881.263.370,00	(46.631.425,63)	94,97
4.01	4.01.2.21.2.20.22.0003	5.1	BELANJA OPERASI	927.894.795,63	881.263.370,00	(46.631.425,63)	94,97

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
4.02			SEKRETARIAT DPRD	137.467.613.579,00	132.946.566.381,00	(4.521.047.198,00)	96,71
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000		Sekretariat DPRD	137.467.613.579,00	132.946.566.381,00	(4.521.047.198,00)	96,71
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	5	BELANJA DAERAH	137.467.613.579,00	132.946.566.381,00	(4.521.047.198,00)	96,71
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	5.1	BELANJA OPERASI	134.197.908.089,00	129.978.583.381,00	(4.219.324.708,00)	96,86
4.02	4.02.0.00.0.00.22.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.269.705.490,00	2.967.983.000,00	(301.722.490,00)	90,77
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	969.596.669.126,04	942.943.656.831,70	(26.653.012.294,34)	97,25
5.01			PERENCANAAN	27.709.605.534,93	27.430.596.487,00	(279.009.047,93)	98,99
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	27.709.605.534,93	27.430.596.487,00	(279.009.047,93)	98,99
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5	BELANJA DAERAH	27.709.605.534,93	27.430.596.487,00	(279.009.047,93)	98,99
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.1	BELANJA OPERASI	27.645.500.534,93	27.366.771.487,00	(278.729.047,93)	98,99
5.01	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.2	BELANJA MODAL	64.105.000,00	63.825.000,00	(280.000,00)	99,56
5.02			KEUANGAN	884.879.271.210,04	861.510.480.806,70	(23.368.790.403,34)	97,36
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000		Badan Keuangan dan Aset Daerah	772.452.832.184,04	753.247.553.315,00	(19.205.278.869,04)	97,51
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5	BELANJA DAERAH	772.452.832.184,04	753.247.553.315,00	(19.205.278.869,04)	97,51
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.1	BELANJA OPERASI	52.231.664.290,94	47.971.647.101,00	(4.260.017.189,94)	91,84
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.123.720.456,50	1.087.475.570,00	(36.244.886,50)	96,77
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.281.396.903,60	0,00	(2.281.396.903,60)	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	716.816.050.533,00	704.188.430.644,00	(12.627.619.889,00)	98,24
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000		Badan Pendapatan Daerah	100.192.336.260,94	97.094.280.481,00	(3.098.055.779,94)	96,91
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5	BELANJA DAERAH	100.192.336.260,94	97.094.280.481,00	(3.098.055.779,94)	96,91
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.1	BELANJA OPERASI	98.405.658.444,94	95.895.839.981,00	(2.509.818.463,94)	97,45
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.786.677.816,00	1.198.440.500,00	(588.237.316,00)	67,08
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001		UPT PPD Batam Centre	3.232.910.743,27	2.887.305.915,75	(345.604.827,52)	89,31
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5	BELANJA DAERAH	3.232.910.743,27	2.887.305.915,75	(345.604.827,52)	89,31
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.006.894.043,27	2.753.205.915,75	(253.688.127,52)	91,56
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0001	5.2	BELANJA MODAL	226.016.700,00	134.100.000,00	(91.916.700,00)	59,33
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003		UPT PPD Bintan	1.062.746.989,23	990.790.181,00	(71.956.808,23)	93,23
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5	BELANJA DAERAH	1.062.746.989,23	990.790.181,00	(71.956.808,23)	93,23
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.062.746.989,23	990.790.181,00	(71.956.808,23)	93,23
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004		UPT PPD Karimun	997.838.243,25	845.090.497,00	(152.747.746,25)	84,69
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5	BELANJA DAERAH	997.838.243,25	845.090.497,00	(152.747.746,25)	84,69
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.1	BELANJA OPERASI	969.720.514,25	821.272.377,00	(148.448.137,25)	84,69
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0004	5.2	BELANJA MODAL	28.117.729,00	23.818.120,00	(4.299.609,00)	84,71
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005		UPT PPD Lingga	511.736.913,83	487.586.373,00	(24.150.540,83)	95,28
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5	BELANJA DAERAH	511.736.913,83	487.586.373,00	(24.150.540,83)	95,28
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0005	5.1	BELANJA OPERASI	511.736.913,83	487.586.373,00	(24.150.540,83)	95,28

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002		UPT PPD Tanjungpinang	1.951.590.732,17	1.794.076.038,00	(157.514.694,17)	91,93
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5	BELANJA DAERAH	1.951.590.732,17	1.794.076.038,00	(157.514.694,17)	91,93
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.913.328.616,17	1.760.338.039,00	(152.990.577,17)	92,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0002	5.2	BELANJA MODAL	38.262.116,00	33.737.999,00	(4.524.117,00)	88,18
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006		UPT PPD Natuna	633.537.771,03	495.808.039,00	(137.729.732,03)	78,26
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5	BELANJA DAERAH	633.537.771,03	495.808.039,00	(137.729.732,03)	78,26
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0006	5.1	BELANJA OPERASI	633.537.771,03	495.808.039,00	(137.729.732,03)	78,26
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007		UPT PPD Anambas	415.953.985,15	398.295.368,00	(17.658.617,15)	95,75
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5	BELANJA DAERAH	415.953.985,15	398.295.368,00	(17.658.617,15)	95,75
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0007	5.1	BELANJA OPERASI	415.953.985,15	398.295.368,00	(17.658.617,15)	95,75
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008		UPT PPD Batu Aji	896.905.519,09	850.311.659,00	(46.593.860,09)	94,81
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5	BELANJA DAERAH	896.905.519,09	850.311.659,00	(46.593.860,09)	94,81
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.1	BELANJA OPERASI	870.848.319,09	827.211.659,00	(43.636.660,09)	94,99
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0008	5.2	BELANJA MODAL	26.057.200,00	23.100.000,00	(2.957.200,00)	88,65
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009		UPT PPD Kijang	555.180.161,29	519.597.770,00	(35.582.391,29)	93,59
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5	BELANJA DAERAH	555.180.161,29	519.597.770,00	(35.582.391,29)	93,59
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.1	BELANJA OPERASI	528.325.461,29	499.118.270,00	(29.207.191,29)	94,47
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0009	5.2	BELANJA MODAL	26.854.700,00	20.479.500,00	(6.375.200,00)	76,26
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010		UPT PPD Tanjung Batu	382.831.253,75	370.126.014,00	(12.705.239,75)	96,68
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5	BELANJA DAERAH	382.831.253,75	370.126.014,00	(12.705.239,75)	96,68
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0010	5.1	BELANJA OPERASI	382.831.253,75	370.126.014,00	(12.705.239,75)	96,68
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002		UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset	1.308.859.740,00	1.270.911.177,95	(37.948.562,05)	97,10
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5	BELANJA DAERAH	1.308.859.740,00	1.270.911.177,95	(37.948.562,05)	97,10
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.308.859.740,00	1.270.911.177,95	(37.948.562,05)	97,10
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001		UPT Dana Bergulir	284.010.713,00	258.747.978,00	(25.262.735,00)	91,11
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	5	BELANJA DAERAH	284.010.713,00	258.747.978,00	(25.262.735,00)	91,11
5.02	5.02.0.00.0.00.25.0001	5.1	BELANJA OPERASI	284.010.713,00	258.747.978,00	(25.262.735,00)	91,11
5.03			KEPEGAWAIAN	19.793.963.183,00	19.316.741.138,00	(477.222.045,00)	97,59
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000		Badan Kepegawaian dan KORPRI	19.793.963.183,00	19.316.741.138,00	(477.222.045,00)	97,59
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5	BELANJA DAERAH	19.793.963.183,00	19.316.741.138,00	(477.222.045,00)	97,59
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.1	BELANJA OPERASI	19.446.905.592,00	18.972.664.141,00	(474.241.451,00)	97,56
5.03	5.03.0.00.0.00.27.0000	5.2	BELANJA MODAL	347.057.591,00	344.076.997,00	(2.980.594,00)	99,14
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	16.498.935.759,00	15.325.213.721,00	(1.173.722.038,00)	92,89
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	16.498.935.759,00	15.325.213.721,00	(1.173.722.038,00)	92,89
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5	BELANJA DAERAH	16.498.935.759,00	15.325.213.721,00	(1.173.722.038,00)	92,89
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.1	BELANJA OPERASI	15.336.938.964,10	14.196.835.871,00	(1.140.103.093,10)	92,57

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.04	5.04.0.00.0.00.25.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.161.996.794,90	1.128.377.850,00	(33.618.944,90)	97,11
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	140.053.042,07	129.083.433,00	(10.969.609,07)	92,17
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	140.053.042,07	129.083.433,00	(10.969.609,07)	92,17
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5	BELANJA DAERAH	140.053.042,07	129.083.433,00	(10.969.609,07)	92,17
5.05	5.01.5.05.0.00.24.0000	5.1	BELANJA OPERASI	140.053.042,07	129.083.433,00	(10.969.609,07)	92,17
5.06			PENGELOLAAN PERBATASAN	6.712.957.924,00	6.129.768.952,00	(583.188.972,00)	91,31
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000		Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.712.957.924,00	6.129.768.952,00	(583.188.972,00)	91,31
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5	BELANJA DAERAH	6.712.957.924,00	6.129.768.952,00	(583.188.972,00)	91,31
5.06	5.06.0.00.0.00.27.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.712.957.924,00	6.129.768.952,00	(583.188.972,00)	91,31
5.07			PENGELOLAAN PENGHUBUNG	13.861.882.473,00	13.101.772.294,00	(760.110.179,00)	94,52
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000		Badan Penghubung Daerah	13.861.882.473,00	13.101.772.294,00	(760.110.179,00)	94,52
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	13.861.882.473,00	13.101.772.294,00	(760.110.179,00)	94,52
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	13.358.791.073,00	12.600.354.354,00	(758.436.719,00)	94,32
5.07	5.07.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	503.091.400,00	501.417.940,00	(1.673.460,00)	99,67
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	51.206.443.087,00	49.818.552.697,00	(1.387.890.390,00)	97,29
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	51.206.443.087,00	49.818.552.697,00	(1.387.890.390,00)	97,29
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000		Inspektorat	51.206.443.087,00	49.818.552.697,00	(1.387.890.390,00)	97,29
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5	BELANJA DAERAH	51.206.443.087,00	49.818.552.697,00	(1.387.890.390,00)	97,29
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5.1	BELANJA OPERASI	50.281.677.187,00	48.987.589.640,00	(1.294.087.547,00)	97,43
6.01	6.01.0.00.0.00.28.0000	5.2	BELANJA MODAL	924.765.900,00	830.963.057,00	(93.802.843,00)	89,86
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	44.877.969.777,00	41.636.034.038,00	(3.241.935.739,00)	92,78
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	44.877.969.777,00	41.636.034.038,00	(3.241.935.739,00)	92,78
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	44.877.969.777,00	41.636.034.038,00	(3.241.935.739,00)	92,78
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	44.877.969.777,00	41.636.034.038,00	(3.241.935.739,00)	92,78
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	43.450.243.743,00	40.295.688.337,00	(3.154.555.406,00)	92,74
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.427.726.034,00	1.340.345.701,00	(87.380.333,00)	93,88
			Jumlah	(22.286.164.438,01)	(3.169.898.762,08)	19.116.265.675,93	14,22

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp3.712.434.360.163,46 atau sebesar 94,94% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.910.214.946.462,43. Beberapa realisasi pendapatan daerah yang tidak mencapai realisasi 80% dengan rincian sebagai berikut:

a. Rendahnya capaian realisasi Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB sebesar Rp273.480.737.600,00 atau sebesar 68,44% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp399.572.412.018,00, secara umum tidak tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah, yang mewajibkan pemerintah daerah memberikan insentif pembayaran Wajib Pajak setara dengan beban pajak tahun sebelumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam implementasinya Undang-Undang HKPD tersebut menerapkan insentif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 39,74%, yang menyebabkan penurunan realisasi dibandingkan target awal. Selain itu, rendahnya capaian BBNKB dipengaruhi kondisi perekonomian yang belum stabil yang menyebabkan penurunan penjualan kendaraan baru dan rendahnya daya beli masyarakat. Disamping itu juga memberikan insentif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik (EV) dalam rangka merangsang pasar baru.

b. Rendahnya capaian realisasi Pajak Alat Berat (PAB) sebesar Rp614.336.352,00 atau sebesar 14,17% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp4.334.952.300,00 dikarenakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terlebih dahulu harus menerbitkan regulasi turunan yang mengatur tentang tata cara pemungutan PAB sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025. Sebagai tindaklanjut atas regulasi dimaksud, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1289/KPTS-28/VII/2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Pajak Alat Berat di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga pemungutan PAB baru dapat dilaksanakan secara efektif sejak bulan September 2025.

c. Rendahnya capaian realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebesar Rp13.300.000,00 atau sebesar 10,57% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp125.775.000,00 pada BLUD SMK Dinas Pendidikan dikarenakan tidak dapat dioperasionalkannya secara maksimal beberapa kamar Edotel (Educational Hotel) yang dikelola oleh SMKN 2 Batam dan SMKN 2 Tanjungpinang.

d. Tidak terealisasi Retribusi Pertambangan Rakyat pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp84.631.165,00 dikarenakan dikarenakan belum dapat dilakukan pemungutan Retribusi Pertambangan Rakyat yang disebabkan belum ditetapkannya tarif Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA). Untuk itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menuangkan tarif IPERA ke dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah yang saat ini dalam tahap evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur.

e. Rendahnya capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp2.275.536.541,00 atau 73,40% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.100.000.000,00 dikarenakan kerugian finansial pada dua BUMD berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025. Kerugian yang dialami oleh PT. Pelabuhan Kepri sebesar Rp1.864.966.167,00 dan PDAM Tirta Kepri sebesar Rp2.017.095.818,00, sedangkan pada BUMD PT. Pembangunan Kepri mencatat laba kecil sebesar Rp323.079.823,00 sehingga ketiga BUMD tersebut belum dapat memberikan dividen kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2025. Sementara itu PT. Energi Kepri (Perseroda) yang baru berdiri berdasarkan Peraturan

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri. Hingga akhir tahun 2025, BUMD tersebut belum beroperasi secara penuh sehingga belum dapat memberikan dividen.

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi belanja daerah sebesar Rp3.715.604.258.925,54 atau sebesar 94,48% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.932.501.110.900,44. Beberapa realisasi belanja daerah yang tidak mencapai realisasi 80% secara umum disebabkan antara lain:

a. Rendahnya capaian realisasi Belanja Subsidi terealisasi sebesar Rp834.852.991,00 atau sebesar 29,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.864.494.061,38 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Tidak tercapainya target belanja dikarenakan replikasi Program Subsidi Margin 0% bagi UMKM oleh Pemerintah Kota Batam, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Bintan turut berpengaruh terhadap tingkat pemanfaatan program di tingkat Provinsi. Dengan adanya program sejenis di tingkat kabupaten/kota, UMKM memiliki lebih banyak alternatif untuk memperoleh pembiayaan dengan skema subsidi margin yang relatif sama. Dalam kondisi tersebut, pelaku UMKM cenderung memilih program yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dari sisi kemudahan persyaratan, kecepatan proses, besaran pinjaman, jangka waktu, maupun kedekatan lokasi layanan. Hal ini menyebabkan sebagian UMKM yang menjadi target sasaran program provinsi beralih memanfaatkan program yang disediakan oleh pemerintah daerahnya masing-masing, sehingga permintaan terhadap subsidi margin yang bersumber dari APBD Provinsi menjadi lebih rendah dari yang telah diproyeksikan.

b. Rendahnya capaian realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.834.940.000,00 atau sebesar 64,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.856.445.000,00. Tidak tercapainya target belanja dikarenakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan verifikasi kembali terhadap sasaran penerima bantuan sosial untuk menghindari terjadinya duplikasi penerima bantuan dana dengan jenis, peruntukan dan tujuan yang sama dengan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota sebelumnya, hal ini dilakukan dalam rangka pengendalian penyaluran bantuan sosial.

c. Tidak terealisasi Belanja Tidak Terduga dari yang dianggarkan sebesar Rp2.281.396.903,60 dikarenakan tidak ada peristiwa yang mengakibatkan adanya pengeluaran dari belanja tidak terduga. Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi adanya bencana yang harus segera diatasi dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

7.3.3. Kebijakan Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Dalam pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau TA 2025, terdapat beberapa kali pergeseran anggaran yang dilakukan melalui Perubahan Perda tentang APBD dan Perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD dikarenakan adanya beberapa kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, adanya penyesuaian

alokasi TKD, belanja yang bersifat mengikat berupa pemenuhan belanja pegawai, belanja bersifat wajib berupa Penyelesaian Pembayaran atas Kewajiban Pihak Ketiga (Tunda Bayar) untuk Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun Anggaran sebelumnya, dan kebutuhan mendesak yaitu Belanja Bantuan Keuangan dengan objek Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi.

Pergeseran dan Perubahan Anggaran Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pergeseran Pertama ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pergeseran dilakukan karena adanya penyesuaian alokasi Transfer Keuangan Daerah dari Pemerintah Pusat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dengan Nomor KMK 29/2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD TA 2025, serta penyelesaian tunda bayar Tahap I atas pelaksanaan kegiatan pada APBD TA 2024.
b. Pergeseran Kedua ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pergeseran dilakukan karena sebagai tindak lanjut penyesuaian Alokasi Pendapatan KB/LB DBH (KMK 44/2024 ttg Penyaluran KB dan LB DBH Tahun 2024, serta pelaksanaan efisiensi belanja yang dialihkan/diformulasikan kepada rekening Belanja Tidak terduga untuk keperluan penyelesaian Tunda Bayar pekerjaan TA 2024 Tahap II, dan keperluan pelaksanan dukungan Asta Cita.
c. Pergeseran Ketiga ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 18 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pergeseran dilakukan untuk penggunaan rekening Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk keperluan penyelesaian Tunda Bayar pekerjaan TA 2024 Tahap II, dan keperluan pelaksanan dukungan Asta Cita.
d. Pergeseran Keempat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 29 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pergeseran dilakukan untuk keperluan belanja pegawai yaitu Pergeseran Belanja Pegawai Non ASN untuk gaji PPPK, serta pergeseran BTT untuk penyeselaian tunda bayar kegiatan 2024.
e. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang disajikan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

f. Pergeseran Pertama setelah Perubahan APBD TA 2025 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 56 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pergeseran dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan belanja yang bersifat mengikat yaitu terdapatnya kekurangan alokasi belanja pegawai pada SKPD dengan melakukan formulasi terlebih dahulu pada rekening BTT.

g. Pergeseran Kedua setelah Perubahan APBD TA 2025 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pergeseran dilakukan pada anggaran BTT untuk pemenuhan kekurangan aggaran belanja pegawai pada SKPD.

h. Pergeseran Ketiga setelah Perubahan APBD TA 2025 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pergeseran dilakukan dalam rangka penggunaan alokasi BTT untuk kebutuhan mendesak yaitu Belanja Bantuan Keuangan dengan objek Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi dalam rangka bantuan kepada Pemerintah Aceh, Sumatera Barat, dan Pemerintah Sumatera Utara.

7.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan *e-SAKIP* adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi atas capaian kinerja satuan kerja perangkat daerah setiap triwulan secara transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan dan RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yang ditargetkan untuk dicapai.

Apabila semakin tinggi realisasi indikator menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{CAPAIAN KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Sedangkan semakin tinggi realisasi indikator menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{CAPAIAN KINERJA} = \frac{(2 \times \text{TARGET}) - \text{REALISASI}}{} \times 100\%$$

TARGET

Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*peformance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Tabel 7.3.3 Skala Pengukuran Kategori

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	> 100%	Sangat baik
3	75% s.d 100%	Baik
2	55% s.d 75%	Cukup
1	< 55%	Kurang

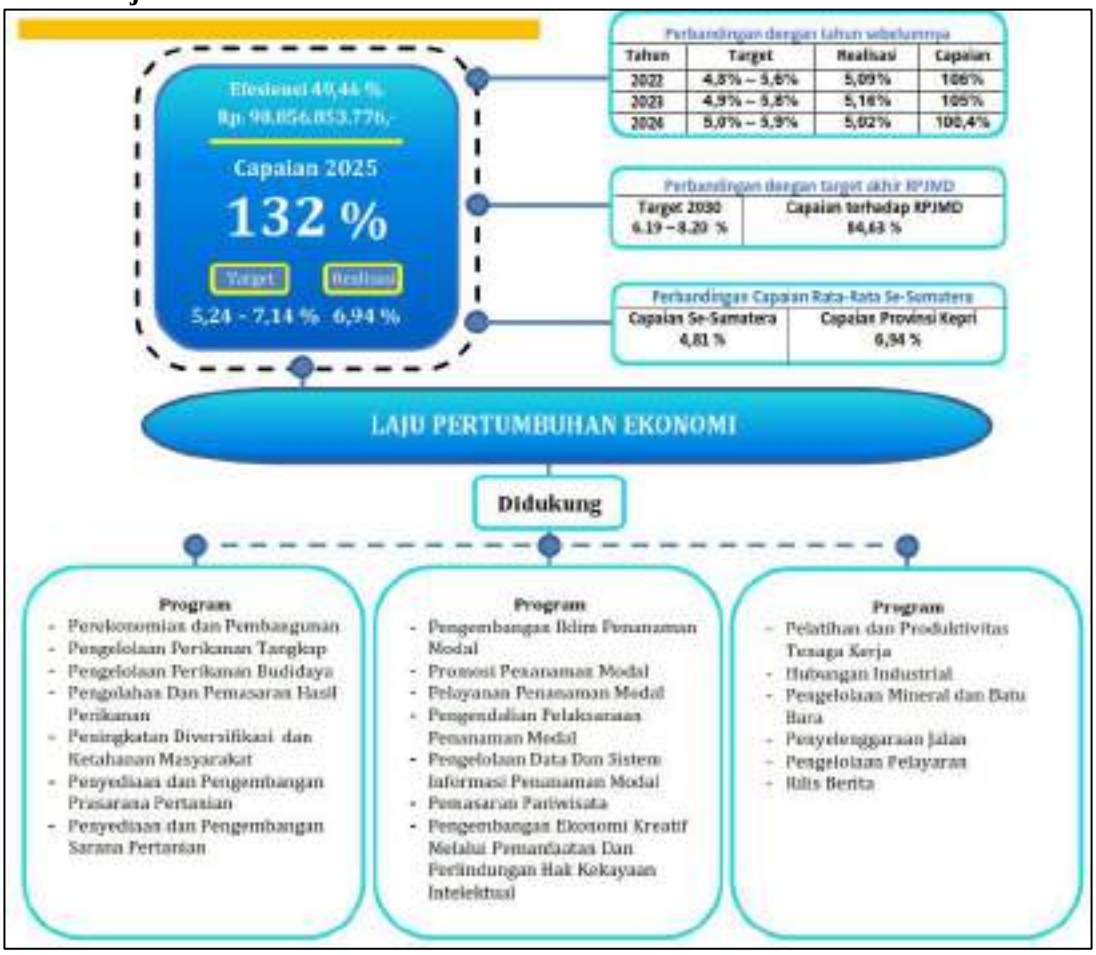
7.3.5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan target kinerja yang telah ditetapkan, analisis atas pencapaian sasaran pada bagian ini dilakukan dengan melihat realisasi pelaksanaan program untuk setiap bidang kewenangan. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gaps*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Analisis dalam laporan ini dilakukan per indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Pemerintah Provinsi Kepulauan yang ditetapkan pada tahun 2025. Dengan ini disampaikan analisa capaian kinerja organisasi yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut:

7.3.5.1. Sasaran Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan

7.3.5.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi



Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkelanjutan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan Ekonomi pada Triwulan IV Tahun 2025 sudah baik dengan realisasi kinerja sebesar 6,94% dari target sebesar 5,24 – 7,14% (penggunaaan target terendah) sehingga capaian kinerja mencapai 132%.

Perlu kami sampaikan bahwa telah dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja, di mana indikator kinerja yang digunakan tetap sama namun mengalami penyesuaian pada penamaan serta target pencapaiannya. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan organisasi, serta peningkatan akurasi dalam pengukuran kinerja. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Pada Indikator ini perjanjian kinerja murni tahun 2025 menjanjikan pencapaian indikator Pertumbuhan Ekonomi dengan target 5,1 – 6,1%, kemudian perjanjian kinerja

mengalami perubahan dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan target 5,24 – 7,14%.

Pada bagian ini, kami akan menyampaikan hasil analisis atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja terbaru sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi. Analisis ini mencakup tingkat pencapaian setiap indikator, efektivitas pelaksanaan program, serta identifikasi faktor pendukung dan hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai keberhasilan maupun aspek yang masih perlu ditingkatkan, sehingga menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam mencapai target kinerja pada periode berikutnya.

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Mewujudkan Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan dilihat dari indikator Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan maksimal. Realisasi indikator pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 6,94% dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 5,24 – 7,14% (penggunaan target angka terendah) sehingga capaian kinerja sebesar 132% atau dalam kategori Sangat Baik.”

Tabel 7.3.4 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,24 – 7,14%	6.94%	132%

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Perekonomian Kepulauan Riau menunjukkan kinerja yang kuat dan terus membaik di triwulan IV-2025, dengan pertumbuhan didorong oleh sektor industri, ekspor, dan investasi. Pola pertumbuhan yang lebih tinggi secara y-on-y dan q-to-q menunjukkan momentum positif yang perlu dijaga melalui kebijakan yang mendukung investasi, ekspor, dan stabilitas makroekonomi. Prestasi Saat Ini:

1. Pertumbuhan tinggi dan inklusif (6,94% dengan diversifikasi sektor);
2. Posisi sebagai *growth leader* di Sumatera (7,89% vs rata-rata 4,54%);
3. Struktur ekonomi yang semakin modern dengan dominasi industri dan jasa.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dapat dipengaruhi Sektor PDRB menurut Lapangan Usaha dan PDRB Menurut Pengeluaran.

I. Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha

Grafik 7.3.1 PDRB Lapangan Usaha Kepulauan Riau C-to-C TW IV-2025



Kategori	Share (%)	Pertumbuhan	Andil Pertumbuhan
Industri Pengolahan	41,57	7,52	3,14
Konstruksi	19,87	5,30	1,03
Pertambangan dan Penggalian	10,06	18,01	1,57
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,42	7,35	0,82
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,98	3,49	0,10
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,68	4,11	0,12
Informasi dan Komunikasi	2,39	-2,65	-0,10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,32	-1,46	-0,04
Transportasi dan Pergudangan	2,02	7,18	0,14
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,83	2,57	0,06
Jasa Pendidikan	1,33	5,48	0,06
Pengadaan Listrik dan Gas	1,14	10,37	0,11
Real Estate	1,09	5,71	0,07
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,86	2,67	0,03
Jasa lainnya	0,62	1,36	0,01
Pengelolaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	11,70	0,01
Jasa Perusahaan	0,00	16,70	0,00

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Analisa dari sisi Penawaran (PDRB Menurut Lapangan Usaha)

1. Struktur Ekonomi Dominan:

   Industri Pengolahan (41,83%): *Backbone economy* dengan kontribusi terbesar. Konstruksi (20,16%): Penopang kedua, indikator aktivitas investasi. Pertambangan & Penggalian (10,29%): Sektor ekstraktif dengan nilai tambah tinggi.

2. Performa Sektor Unggulan:

   a. Sektor Primer (Pertumbuhan y-on-y): Pertambangan & Penggalian: 18,67% (tertinggi) dengan andil 1,91%; Pertanian, Kehutanan, Perikanan: -13,42% (kinerja terburuk) Analisis: Terjadi *resource shifting* dari sektor primer tradisional ke sektor ekstraktif bernilai tinggi

   b. Sektor Sekunder (Motor Pertumbuhan): Industri Pengolahan: 8,89% dengan andil 3,71% (kontributor terbesar); Konstruksi: 4,11% dengan andil 0,82%; Pengadaan Listrik & Gas: 12,99% (infrastruktur pendukung industri)

   c. Sektor Tersier (Pertumbuhan Diversifikasi): Jasa Keuangan & Asuransi: 12,16% (finansialisasi ekonomi); Jasa Perusahaan: 16,70% secara c-to-c (bisnis *support services* berkembang); Jasa Pendidikan: 12,92% q-to-q (investasi human capital).

3. Transformasi Struktural: Dominasi sektor industri meningkat (41,83% vs sebelumnya ~40%). Penurunan share sektor pertanian (sekitar 2,7% dari total); Peningkatan kontribusi jasa modern: jasa keuangan, informasi, dan Pendidikan.

II. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Menurut Pengeluaran)

Grafik 7.3.2 PDRB Pengeluaran Kepulauan Riau C-to-C TW IV-2025



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Analisa dari sisi Permintaan (PDRB Menurut Pengeluaran)

1. Komposisi Pengeluaran 2025:

   PMTB: 43,99% (investasi sebagai penggerak utama), Konsumsi Rumah Tangga: 39,82% (stabilitas permintaan domestik). Net Ekspor: 8,37% (surplus perdagangan kontributif). Konsumsi Pemerintah: 6,39% (relatif kecil).

2. Dinamika Pertumbuhan Komponen

   a. Investasi (PMTB): y-on-y: 6,24% (andil 2,58%). c-to-c: 6,81% (andil 2,81%). Implikasi: Investasi sebagai *engine of growth* yang konsisten.

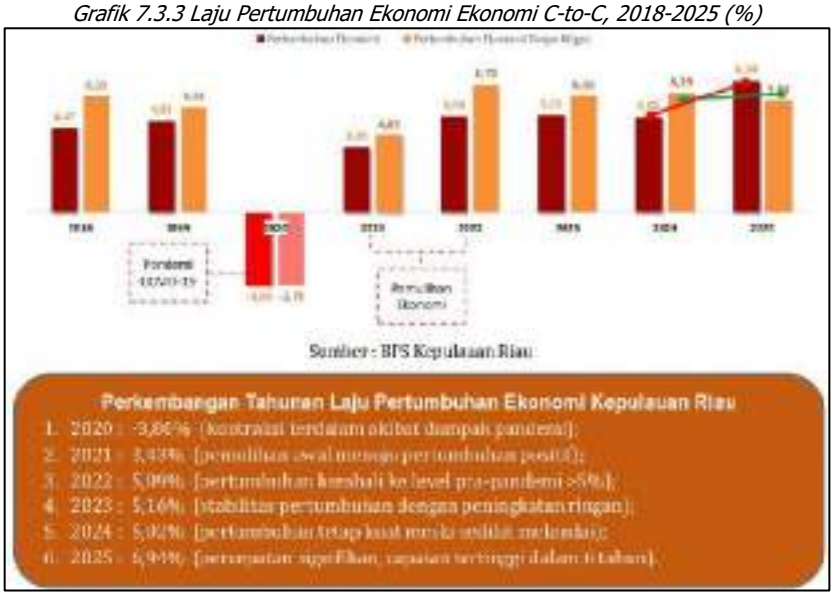
   b. Ekspor Neto: Pertumbuhan ekspor y-on-y: 8,42% vs impor 6,80%. Net ekspor tumbuh 27,02% y-on-y dengan andil 3,65%. Analisis: Kepri sebagai *export-oriented economy* dengan daya saing internasional.

   c. Konsumsi: Rumah Tangga: Stabil (3,84% c-to-c). Pemerintah: Volatil (kontraksi y-on-y tapi melonjak q-to-q). LNPRT: Tumbuh solid (4,82% c-to-c)

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data realisasi, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren positif dan stabil dari tahun 2021 hingga 2025. Data terkini menegaskan bahwa perekonomian Kepulauan Riau tidak hanya pulih dari kontraksi akibat pandemi, tetapi juga mampu mempertahankan pertumbuhan di atas 5% dalam tiga tahun terakhir.

Grafik 7.3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi C-to-C, 2018-2025 (%)



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Dari kontraksi -3,80% di 2020, perekonomian Kepulauan Riau tidak hanya berhasil pulih, tetapi juga menjaga momentum pertumbuhan dengan stabil di kisaran 5% selama tiga tahun, sebelum akhirnya mengalami akselerasi signifikan menjadi 7,48% di 2025. Pola pertumbuhan ini mencerminkan pengelolaan ekonomi yang prudent sekaligus adaptif, dengan kemampuan untuk berakselerasi ketika kondisi memungkinkan. Pencapaian pertumbuhan 6,94% di 2025 yang merupakan peningkatan 10,74 poin persentase dari titik terendah 2020 menegaskan posisi Kepri sebagai salah satu provinsi dengan kinerja ekonomi paling dinamis di Indonesia.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja indikator Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,94% dengan target RPJMD tahun 2030 sebesar 6.19 - 8.20% (penggunaan target tertinggi) sehingga capaian kinerja sebesar 84,63%.

Grafik 7.3.4 Perbandingan Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Target Akhir RPJMD



Sumber : Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada triwulan IV-2025 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,54%. Pertumbuhan q-to-q triwulan IV-2025 tumbuh sebesar 0,3%. Dan secara c-to-c tumbuh sebesar 4,81%. Struktur perekonomian Pulau Sumatera secara regional didominasi oleh Provinsi Sumatera Utara sebesar 23,52%, sementara Kepulauan Riau berada pada urutan kelima dengan *share* sebesar 7,57%.

Posisi Provinsi Kepulauan Riau dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi di se-Sumatera, dapat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 7.3.5 Ringkasan PDRB per Provinsi di Pulau Sumatera TW IV 2025 Tahun Dasar 2010

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

E. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 didorong oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi Multisektoral: Pertumbuhan didorong secara bersamaan oleh Kontribusi besar dari sektor minyak dan gas (migas);
2. Realisasi APBD Tahun 2025 memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kepri;
3. Jumlah penumpang berangkat pada angkutan laut mengalami peningkatan 7,52% (y-on-y) dan 7,72% (c-to-c) (Sumber : Simapel – Syahbandar);
4. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat 23,05% (yon-y) dan 22,75% (c-to-c) (Sumber : Imigrasi);
5. Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara yang datang ke Kepulauan Riau meningkat 16,56% (y- on-y) dan 12,15% (c-to-c). (sumber: Imigrasi);
6. Total Bongkar dan Muat Barang Angkutan Udara meningkat sebesar 19,39% dan 38,65% (c-to- c). (sumber: Simopel – Syahbandar);
7. Total Bongkar dan Muat Barang Angkutan Laut meningkat sebesar 6,42% dan 20,08% (c-to-c). (sumber: Simopel – Syahbandar);
8. Realisasi Investasi di Kepri naik 36,84% dimana Penanaman Modal Asing naik sebesar 16,62% dan Penanaman Modal Dalam Negeri naik sebesar 112,04% (c-to-c). (sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal);
9. Realisasi pengadaan semen meningkat 8,32% (y-on-y) dan 20,62% (c-to-c). (sumber: ASI);
10. Penjualan listrik tumbuh sebesar 19,36% (y-on-y) dan 20,83% (cto-c). (sumber: PLN Batam);
11. Produksi Minyak Bumi dan Gas Alam tumbuh dampak dari adanya lapangan minyak yang baru diresmikan dan beroperasi pada 2025, yaitu Lapangan Forel dan Terubuk di lepas Pantai Laut Natuna (c-toc). (sumber: CNBC Indonesia).

Dalam peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Efektifitas pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi diantaranya : mengontrol laju inflasi, meningkatkan pendapatan daerah, menjaga stabilitas perekonomian daerah, membantu pemerataan distribusi pendapatan daerah, membantu meningkatkan kapasitas produksi daerah, meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan

Pelaksanaan Gelar Pasar Murah & Meeting TPID & TP2DD Prov Kepri



Sumber : Biro Perekonomian dan Pembangunan Prov Kepri

2. Memperkuat iklim investasi adalah dengan menginisiasi dan mendorong terbentuknya Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, yakni Perda Nomor 2 Tahun 2025. Aturan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan berusaha yang nyata baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri, sekaligus menjaga prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025



Sumber : DPMPTSP Prov Kepri

Penandatanganan MoU Prov Kepri Lampung,Maluku Utara, dan Jawa Tengah



Sumber : DPMPTSP Prov Kepri

3. Memperkuat kerja sama dengan daerah lain adalah melalui kolaborasi antar pemerintah provinsi untuk memperluas akses pasar, pertukaran potensi ekonomi, dan peningkatan investasi. Pada 14 Juni 2025, Pemerintah Provinsi Kepri bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Lampung, dan Maluku Utara menandatangani kesepakatan kerja sama antar daerah yang mencakup *capacity building* dan pertukaran informasi strategis

4. Pelaksanaan Promosi Investasi memanfaatkan platform internasional World Expo 2025 di Osaka, Jepang sebagai salah satu strategi utama dalam promosi investasi dan pencarian investor. Kegiatan tersebut dirancang untuk memperkenalkan potensi investasi unggulan Kepri, termasuk energi terbarukan, industri hilirisasi, pariwisata, dan teknologi industri kreatif

Penandatanganan Promosi Investasi World Expo 2025



Sumber : DPMPTSP Prov Kepri

5. Menekan biaya produksi dengan Penyediaan sarana dan prasarana penangkapan serta budidaya ikan di laut sebanyak 5.321 unit yang diberikan kepada nelayan dan pembudidaya ikan kecil. Berdampak pada peningkatan tingkat kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan yang diukur melalui Nilat Tukar Nelayan (NTN) sebesar 104,29 dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) sebesar 91,49 per Desember 2025

6. Meluncurkan program JIWA, merupakan hasil kolaborasi antara Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Pemprov Kepri, serta pelaku industri pariwisata di Kepulauan Riau. Melalui program ini, wisatawan dari Johor cukup menunjukkan ID Card Johor untuk menikmati diskon khusus antara 10 hingga 30 % di 33 destinasi hotel, restoran, transportasi, dan layanan wisata lainnya di Kepulauan Riau.

Peluncuran Program JIWA



Sumber : DPMPTSP Prov Kepri

7. Upaya meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk perikanan yang dihasilkan Unit Pengolahan Ikan (UPI), Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan administratif dalam penerapan Cara Pengolahan yang Baik (*Good Manufacturing Practices*/GMP) dan standar sanitasi

8. Menyelenggarakan event pariwisata yang berkualitas dan promosi pariwisata baik melalui media cetak, elektronik, dan pelaksanaan pameran untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan telah berhasil mendatangkan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 1.780.013 orang atau naik sebesar 20,97 % dibandingkan capaian tahun 2024, serta mendatangkan 3.916.176 wisatawan nusantara atau mengalami kenaikan sebesar 12 % dibandingkan tahun 2024 yang lalu yang pada akhirnya menyumbang kontribusi PDRB sebesar 5.149,98 Milyar Rupiah.

9. Pemberdayaan Pelaku Usaha Perdagangan pada Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau dengan tema pemasaran produk dalam negeri berorientasi ekspor dan sistem pemasaran produk secara digital.

10. Pelatihan dan Pembinaan 100 orang Pelaku IKM serta Fasilitasi Sertifikasi Produk TKDN dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau yang telah diterbitkan sebanyak 100 Sertifikat.

11. Menyusun kajian terkait Proses Bisnis Sentra Industri, Kajian Pemetaan Peluang pasar bagi Sentra industry, Kajian Kerjasama sentra industry dengan kawasan-kawasan industry, Kajian Penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM, Kajian Identifikasi standart bahan baku dan analisis alur material.

12. Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian modern dan Dorongan penggunaan teknologi di pertanian untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas produksi, termasuk dukungan pada inovasi agribisnis berbasis teknologi dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang dikuti oleh 6 kelompok wanita Tani.

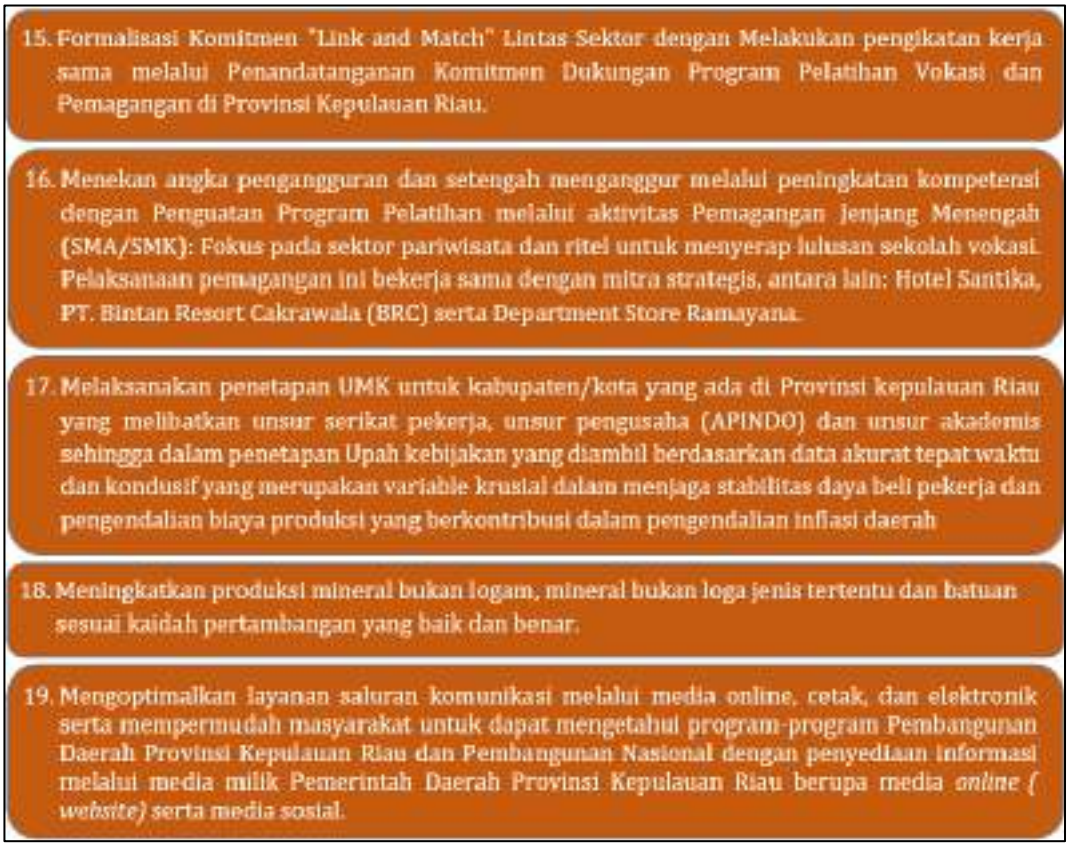
13. Pengembangan akses pasar domestik dan regional untuk produk pertanian lokal agar komoditas pertanian Kepri memiliki pangsa pasar lebih luas, termasuk peluang ekspor serta Kebijakan penguatan distribusi logistik dan stabilitas harga pangan, termasuk melalui pasar murah dan stabilisasi pasokan untuk mendukung sektor pertanian lokal yang dilaksanakan di 11 lokasi

Monitoring Kelancaran Transportasi Laut



Sumber : Dishub Prov Kepri

14. Mendukung kelancaran konektivitas transportasi perairan dengan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha mencapai 8 izin kapal, Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat mencapai 389 izin, Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah mencapai 25 Izin, Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan mencapai 21 Izin.



Dalam pelaksanaan terdapat permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, sebagai antara lain:

1. Ketergantungan pada Sumber Eksternal: Beberapa barang konsumsi yang mempengaruhi inflasi, seperti bahan bakar dan bahan pokok dipenuhi dari impor antar provinsi maupun luar negeri, sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal yang di luar kendali daerah;
2. Ketergantungan pada sektor tertentu, seperti migas dan perikanan, yang membuat ekonomi daerah rentan terhadap guncangan eksternal;
3. Kualitas Tanah atau lahan berpasir dan kurang subur, sehingga produktivitas tanaman rendah. Hal ini membutuhkan biaya tambahan untuk pupuk dan rekayasa lahan agar bisa ditanami secara optimal;
4. Bantuan sarana dan prasarana penangkapan serta budidaya ikan di laut belum sepenuhnya menjangkau seluruh nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan usahanya. Selain keterbatasan jangkauan bantuan, masih banyak nelayan dan pembudidaya kecil yang belum memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang memadai, sehingga mengalami kesulitan dalam mengembangkan dan memperluas usaha perikanannya;
5. Permasalahan dalam penerbitan rekomendasi dan SKP di Provinsi Kepulauan Riau meliputi keterbatasan UPI yang memenuhi standar GMP dan sanitasi, terbatasnya SDM pembina, rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi,

keterbatasan sarana pengolahan serta proses administrasi dan perizinan yang masih memerlukan pendampingan;

6. Transportasi antar pulau masih menjadi kendala besar, sehingga distribusi hasil pertanian tidak efisien. Biaya logistik tinggi menyebabkan harga produk pertanian lokal kurang kompetitif;
7. Masih minimnya penerbangan langsung dari kota-kota potensial ke Kepulauan Riau dan mahalnya tiket transportasi juga menjadi hambatan optimalnya kunjungan wisatawan.

F. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan mengurangi permasalahan dan kedala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya sebagai berikut:

1. Pertumbuhan yang saat ini sangat ditopang oleh belanja pemerintah perlu diwaspadai kesinambungannya. Kedepannya, pertumbuhan perlu didorong lebih kuat oleh investasi swasta dan ekspor murni untuk menjamin keberlanjutan;
2. Peningkatan Investasi di Sektor Energi: Melalui Peraturan Daerah yang telah disahkan, pemerintah daerah harus dapat menarik investasi swasta dan nasional di sektor energi. Penyiapan regulasi yang jelas dan insentif yang menarik akan membantu mendongkrak investasi, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian daerah;
3. Diversifikasi Sumber Energi: Pemerintah provinsi perlu menggali potensi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa untuk menciptakan keberlanjutan energi. Diversifikasi sumber energi akan mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendukung ketahanan energi jangka panjang;
4. Penguatan Sektor Energi Lokal: Peningkatan kapasitas dan dukungan kepada BUMD Energi Kepri dalam mengelola sumber daya alam yang ada akan memperkuat ekonomi daerah. Biro Perekonomian harus memfokuskan pengelolaan BUMD agar lebih efektif dalam memanfaatkan potensi energi lokal untuk kepentingan masyarakat, dengan telah dibentuknya PT. Energi Kepri (Perseroda) pada Tahun 2025 yang merupakan akuisisi dari Anak Perusahaan dari PT. Pembangunan Kepri. Dengan BUMD yang khusus menangani energi, nilai tambah dari sumber daya alam energi dapat lebih maksimal diserap oleh daerah berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lapangan kerja lokal, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan energi dari luar wilayah;
5. Penyusunan Strategi daerah untuk revitalisasi Pelatihan Vokasi yang fokus pada Optimalisasi Sistem Informasi Pasar kerja, Penguatan Peran DUDI dalam Proses Pendidikan Vokasi, Penguatan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebutuhan Pasar Kerja;
6. Upaya konkret untuk meningkatkan penerbitan rekomendasi dan SKP di Provinsi Kepulauan Riau melalui pelatihan dan pendampingan intensif bagi pelaku usaha

dan SDM pembina terkait GMP dan sanitasi, pemanfaatan sistem online untuk pengajuan dan verifikasi dokumen, pembangunan atau perbaikan fasilitas pengolahan ikan agar memenuhi standar keamanan pangan serta koordinasi reguler antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk mempercepat penerbitan sertifikat dan pengawasan UPI secara merata;

7. Pengembangan pertanian perkotaan (*urban farming*) dan hidroponik untuk mengatasi keterbatasan lahan serta diversifikasi pangan lokal dengan memanfaatkan tanaman yang sesuai kondisi tanah (misalnya kelapa, sagu);
8. Pelaksanaan promosi dengan mengikuti *event-event* berskala nasional maupun internasional untuk memperkenalkan potensi yang ada di provinsi Kepulauan Riau.
9. Mengoptimalkan promosi pariwisata di berbagai chanel media untuk lebih meningkatkan kunjungan wisatawan dan memperbanyak atraksi wisata untuk memberikan kenyamanan wisatawan;
10. Meningkatkan kesempatan kerja melalui Peningkatan akses Pelayanan ketenagakerjaan dengan mengoptimalkan pelayanan penggunaan aplikasi SIAP kerja yang dapat digunakan dalam layanan pendataran pelatihan di Lembaga pelatihan kerja BLK dan LPK Swasta, Pendaftaran pemagangan ke luar negeri, sertifikasi BNSP, Pendaftaran pencari kerja di karirhub atau portal Pemda dan Portal Swasta dan layanan ketenagakerjaan lainnya seperti *job fair*.

G. Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Tabel 7.3.6 Program dan Realisasi Anggaran yang Mendukung Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Perekonomian dan Pembangunan	351.320.920,00	337.295.059,00	96,01
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	13.496.177.809,12	12.947.287.223,12	95,93
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.887.067.836,00	2.746.081.044,80	95,12
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	127.080.680,68	122.720.139,00	96,57
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	479.411.260,73	429.088.592,00	89,5
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.347.986.248,00	1.390.236.920,00	25,99
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.267.421.214,00	836.834.500,00	66,02
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	219.614.350,00	202.641.291,00	92,27
Program Promosi Penanaman Modal	348.266.180,00	343.536.124,00	98,64
Program Pelayanan Penanaman Modal	211.876.799,00	198.918.230,00	93,88
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	51.106.895,00	48.201.398,00	94,31
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	13.707.100,00	13.517.645,00	98,62
Program Pengelolaan Pelayaran	8.207.522.273,00	4.359.571.277,00	53
Program Pemasaran Pariwisata	7.758.633.839,00	5.647.330.979,00	72,8
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.307.813.811,00	1.253.032.729,00	95,8

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Penyelenggaraan Jalan	49.854.264.462,00	44.032.581.032,00	88,32
Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	6.023.866.700,00	5.867.448.582,00	97,4
Program Hubungan Industrial	233.668.400,00	218.422.398,00	93,48
Program Pengelolaan Mineral dan Batu Bara	620.047.000,00	606.354.000,00	98
Program Rilis Berita	50.000.000,00	50.000.000,00	100
Total	**98.856.583.776,00**	**81.606.099.162,92**	**82,54**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp98.856.583.776,00 terealisasi sebesar Rp81.606.099.162,92 atau 82,54%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp17.250.754.613,08 (17,45%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi (132%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (82,54%) dengan efesiensi 49,46%.

7.3.5.1.2. Rasio Gini



Rasio Gini, Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan alat untuk mengukur tingkat ketimpangan pembagian pendapatan di antara penduduk suatu wilayah. Indeks Gini di Provinsi Kepulauan Riau belum mencapai target yang ditentukan. Rasio Gini pada Tahun 2025 dengan capaian realisasi sebesar 0,385 Indeks dari target sebesar 0,370 – 0,382 Indeks (penggunaan target target tertinggi) dan capaian kinerja sebesar 99%.

Perlu kami sampaikan bahwa telah dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja, di mana indikator kinerja yang digunakan tetap sama namun mengalami penyesuaian pada penamaan serta target pencapaiannya. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan organisasi, serta peningkatan akurasi dalam pengukuran kinerja. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan

Pada Indikator ini perjanjian kinerja murni tahun 2025 menjanjikan pencapaian indikator Indeks Gini dengan target 0,321 Indeks , kemudian perjanjian kinerja mengalami perubahan dengan indikator Rasio Gini dengan target 0,370 – 0,382 Indeks.

Pada bagian ini, kami akan menyampaikan hasil analisis atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja terbaru sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi. Analisis ini mencakup tingkat pencapaian setiap indikator, efektivitas pelaksanaan program, serta identifikasi faktor pendukung dan hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai keberhasilan maupun aspek yang masih perlu ditingkatkan, sehingga menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam mencapai target kinerja pada periode berikutnya.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dilihat dari indikator rasio gini Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan maksimal. Realisasi indikator pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 0,385 Indeks dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 0,370 – 0,382 Indeks (Penggunaan target tertinggi) sehingga capaian kinerja sebesar 99% atau dalam kategori “Baik”.

Tabel 7.3.7 Capaian Rasio Gini

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rasio Gini	0,370 – 0,382 Indeks	0,385 Indeks	99%

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan data yang tercatat, Indeks Gini Rasio sebesar 0,385 indeks termasuk dalam kategori rendah. Capaian ini mencerminkan distribusi pendapatan yang relatif merata di wilayah tersebut, di mana kesenjangan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah tidak terlalu lebar. Dengan tingkat ketimpangan yang tergolong rendah, kondisi ini dapat mendukung stabilitas sosial dan menjadi landasan yang baik untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan di masa mendatang.

Grafik 7.3.5 Tren Perkembangan Penurunan Rasio Gini



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

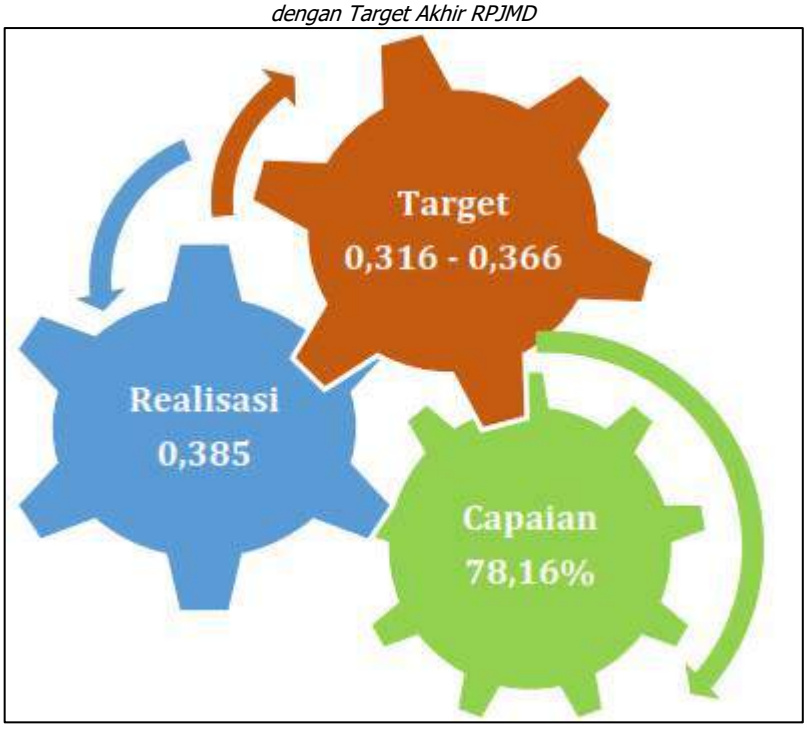
Dapat dilihat pada tabel diatas, Rasio Gini Provinsi Kepulauan Riau meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan analisis data dari tahun 2020 hingga 2025, perkembangan Gini Rasio di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren peningkatan ketimpangan pendapatan yang signifikan dan perlu menjadi perhatian serius.

Pada tahun 2020, ketimpangan berada pada level yang relatif terkendali dengan nilai 0,334. Namun, dalam perjalanan enam tahun berikutnya, meskipun sempat mengalami sedikit perbaikan pada tahun 2022 (0,326), ketimpangan kembali meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 2025 sebesar 0,382. Nilai ini merupakan yang tertinggi dalam periode pengamatan dan menempatkan ketimpangan pendapatan provinsi Kepri.

Kenaikan yang konsisten, terutama dalam dua tahun terakhir (2024–2025), mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif dan merata. Melebarnya kesenjangan ini berpotensi memengaruhi stabilitas sosial, mengurangi efektivitas pengentasan kemiskinan, dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Diperlukan kebijakan yang lebih terarah dan strategis, seperti penguatan program perlindungan sosial, pemerataan akses pendidikan dan peluang kerja, serta dukungan terhadap sektor usaha mikro dan kecil, agar manfaat pembangunan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat. Dengan kata lain, meskipun Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kemajuan dalam beberapa indikator ekonomi, tantangan keadilan distributif tetap harus menjadi prioritas. Pemulihan dan pemertaan pendapatan bukan hanya tugas jangka pendek, melainkan komitmen jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing inklusif.

B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Grafik 7.3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Gini Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD



Sumber : Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

C. Perbandingan antara Realiasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Tabel 7.3.8 Perbandingan Indeks Gini Tingkat Provinsi se-Indonesia per Maret 2025

Rank	Provinsi	Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah Perkotaan+Perdesaan Tahun2025
		Semester 2 (September)
1	PAPUA SELATAN	0,426
2	DKI JAKARTA	0,423
3	DI YOGYAKARTA	0,414
4	JAWA BARAT	0,397
5	PAPUA	0,397
6	KEP. RIAU	0,385
7	GORONTALO	0,383
8	PAPUA BARAT	0,383
9	NUSA TENGGARA BARAT	0,364
	Dst	
INDONESIA		0,363

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Pada Tahun 2025, capaian Rasio Gini Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan capaian nasional berada dibawah capaian nasional dimana Gini Rasio Nasional Tahun 2025 sebesar 0,363. Dibandingkan provinsi se-Indonesia tahun 2025, Rasio Gini

Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,385 pada September 2025 berada pada posisi ke enam setelah Provinsi Papua jika dibandingkan Provinsi se Wilayah Sumatera, Rasio Gini Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,385 berada pada posisi pertama dari Provinsi di Sumatera.

D. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Penyebab utama naiknya indeks Gini di Kepulauan Riau pada Maret 2025 adalah melebarnya ketimpangan pendapatan, terutama di wilayah perkotaan, akibat pertumbuhan ekonomi yang belum merata :



Adapun Upaya yang dilakukan dalam mendukung Penurunan Rasio Gini di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Operasi Pasar di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 12 kegiatan berkolaborasi bersama Instansi atau lembaga yang menjadi mitra kerja Disperindag seperti BI, Distributor dan Pelaku Usaha;
2. Memberikan stimulus/bantuan kepada pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan produknya dan selanjutnya mendaftarkan hak kekayaan intelektual untuk produk yang dihasilkannya serta melaksanakan promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif;
3. Program Penyediaan Subsidi Margin 0% bagi 463 Pengusaha UMKM yang memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi Pengusaha kecil yang selama ini terkendala oleh tingginya beban margin pembiayaan di lembaga keuangan;

4. Pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil melalui Pengembangan Bumdes, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan di wilayah perdesaan;

5. Pemberian Beasiswa dan program dukungan bagi keluarga berpenghasilan rendah dengan jumlah penerima Mahasiswa DII sebanyak 30 Orang dan Mahasiswa S1/D4 sebanyak 528 Orang serta Bantuan mengurangi beban orang tua dalam pembiayaan pendidikan;

Tabel 7.3.9 Bantuan Dalam Pembiayaan Pendidikan Tahun 2025

Kegiatan	Jumlah	Satuan	Kab/Kota
Bantuan Transportasi Darat Siswa SMA	135	Peserta Didik	Bintan, Natuna, Anambas
Bantuan Transportasi Laut Siswa SMA	1927	Peserta Didik	7 Kab/kota
Bantuan Transportasi Laut SMK	457	Peserta Didik	Anambas, karimun, lingga
Bantuan diklat kepelautan/buku pelaut SMK	66	Peserta Didik	Tanjungpinang
Bantuan praktek kerja lapangan peserta didik SMK	722	Peserta Didik	7 Kab/kota
Bantuan makan dan minum peserta didik SMK di natuna	151	Peserta Didik	Natuna
Bantuan Seragam SMA	16.514	Paket	Siswa Baru SMA Negeri se-Kepri
Bantuan Seragam SMK	12.500	Paket	Siswa Baru SMK Negeri se-Kepri
Bantuan Seragam SLB	298	Paket	Siswa Baru SLB Negeri se-Kepri

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

6. Pengadaan Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah Provinsi lain merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk meningkatkan kualitas mutu benih/bibit ternak sapi melalui teknologi Inseminasi Buatan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Pengadaan Bibit sebanyak 500 ekor ayam petelor dan 8 ekor sapi;

7. Pemberian Bantuan Bibit Tanaman dan Holtikultura berdasarkan SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 761 Tahun 2025;

Tabel 7.3.10 Jenis Bantuan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

NO	JENIS BANTUAN	SATUAN	JUMLAH
1	Bantuan Bibit Benih Padi	Kilogram	1.410
2	Bantuan Pupuk Organik	Kilogram	72.100
3	Bantuan Pupuk Hayati	Sachet	235
4	Bantuan Pupuk NPK	Kilogram	18.850
5	Bantuan Pupuk UREA	Kilogram	66.400
6	Bantuan Pupuk KCL	Kilogram	2.700
7	Bantuan Insektisida Nabati	Botol	312
8	Bantuan Amistartop 94	Botol	98
9	Bantuan Furadan	Kilogram	241
10	Bantuan Benih Saprodi Jagung	Kilogram	140
11	Bantuan Bibit Saprodi Sorgum	Kilogram	15
12	Bantuan Benih Cabai Merah	Sachet	792

NO	JENIS BANTUAN	SATUAN	JUMLAH
13	Bantuan Bibit Salak	Batang	2.746
14	Bantuan Hand Sprayer	Unit	19
15	Bantuan Mesin Potong Rumput	Unit	5
16	Bantuan Fungisida Antracol	Kilogram	25
17	Bantuan Calaris	Botol	10
18	Bantuan Hand Traktor	Unit	4
19	Bantuan Pompa Air	Unit	2
20	Bantuan Benih Kacang Panjang	Sachet	61
21	Bantuan Kendaraan/Motor Roda 3	Unit	1
22	Bantuan Bibit Cabai	Sachet	50.000

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

8. Penyediaan asuransi ketenagakerjaan Petani berupa Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah daerah dengan BPJS Ketenakerjaan Tanjungpinang Nomor 120.23/KDH.124/NK-03/2024 dan MOU/8/122024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Ketenagakerjaan Kepada Petani di dengan jumlah Petani yang menerima premi asuransi pada Triwulan I dan II sebanyak 9200 tenaga kerja dan Triwulan III dan IV sebanyak 8.662 tenaga kerja;
9. Intervensi sosial ekonomi yang menyentuh langsung rumah tangga masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, sehingga mendorong peningkatan pendapatan dan konsumsi berupa:
    a) Pemberian Bantuan Sembako bagi 8.150 KK (Kabupaten Karimun 1.100 KK, Kab Lingga 3.700 KK dan Kota Tanjungpinang sebanyak 3.350 KK
    b) Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif Bantuan dengan nilai Rp2.000.000 sampai dengan Rp5.000.000 per orang bagi 390 KK
    c) Pemberian insentif kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
10. Penyediaan jaminan perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi 31.304 nelayan kecil, sehingga aktivitas penangkapan ikan di laut dapat dilakukan dengan lebih aman dan terjamin.

E. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja kedepan

Meskipun nilai Rasio Gini sebesar 0,385 masih termasuk dalam kategori ketimpangan rendah hingga mendekati sedang, yang menandakan bahwa distribusi pendapatan belum sepenuhnya merata dan tantangan kesenjangan masih perlu menjadi perhatian serius. Capaian ini juga menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi harus senantiasa diiringi dengan kebijakan yang inklusif, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, keberhasilan penurunan Rasio Gini di tahun 2025 perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui program-program yang lebih terarah, seperti penguatan perlindungan sosial, perluasan akses kesempatan kerja, dan dukungan berkelanjutan terhadap kelompok masyarakat rentan. Dengan demikian, Provinsi

Kepulauan Riau dapat terus bergerak menuju pembangunan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan di masa mendatang.

Upaya-upaya kedepan dalam pencapaian kinerja penurunan rasio gini di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Menyediakan Sarana Usaha Perikanan Tangkap berupa Armada Perikanan Tangkap dan alat tangkap perikanan bagi nelayan berpenghasilan rendah;
2. Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dengan melakukan sosialisasi/promosi mengenai pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman di sekolah sekolah, pengembangan P2L;
3. Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dengan melakukan Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan Kawasan komoditas pertanian;
4. Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan menyalurkan bantuan kepada masyarat dalam rangka menekan inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk memudahkan pengelolaan data masyarakat miskin yang mudah di akses sehingga program-program bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing kelompok;
6. Penguatan Ekonomi Inklusif melalui UMKM dan Ekonomi Kreatif dengan melakukan Koordinasi dengan OPD terknis terkait Pengembangan Ekonomi Inklusif melalui Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif.

F. Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

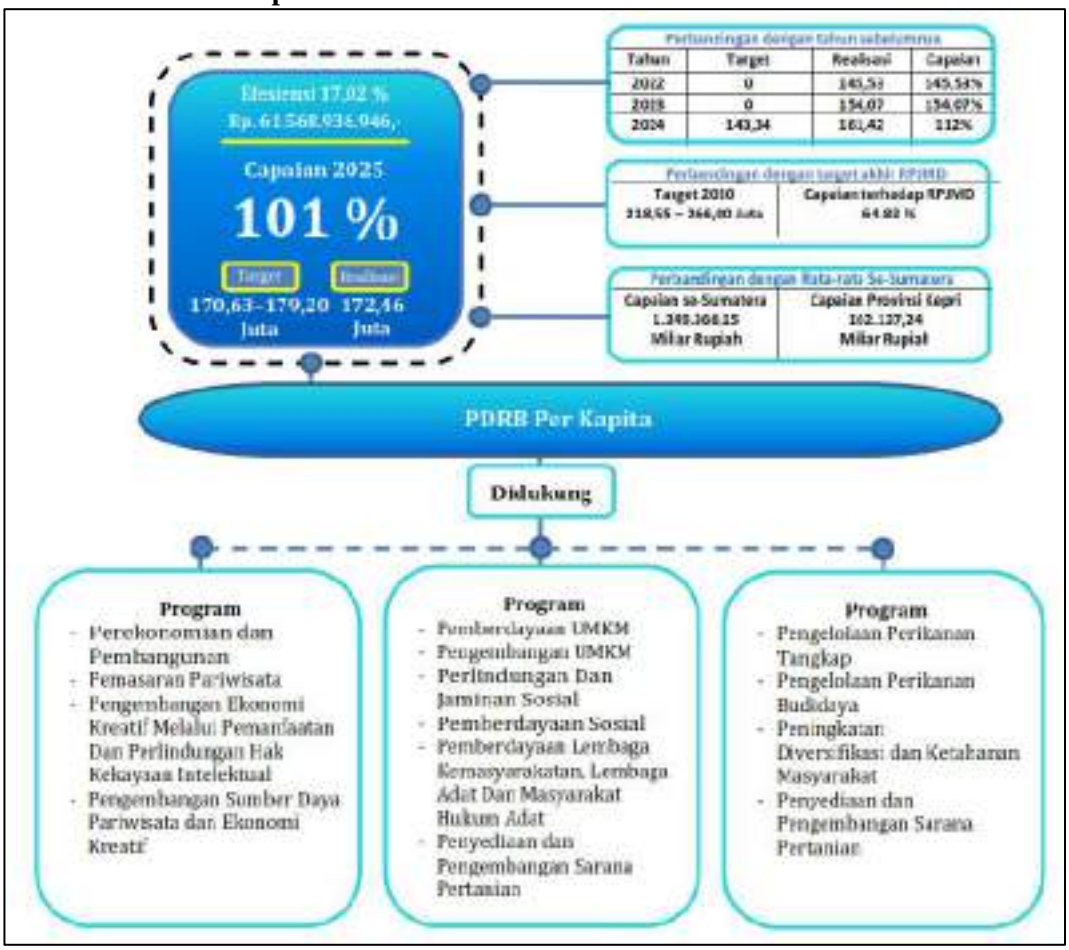
Tabel 7.3.11 Program dan Realisasi Anggaran yang Mendukung Rasio Gini Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Perekonomian dan Pembangunan	351.320.920,00	337.295.059,00	96,01
Program Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok	621.524.637,00	468.688.268,00	75,41
Program Pemasaran Pariwisata	7.758.633.839,00	5.647.330.979,00	72,8
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.307.813.811,00	1.253.032.729,00	95,8
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	100.063.100,00	99.200.000,00	99,14
Program Pemberdayaan UMKM	17.068.663.172,00	14.573.871.921,00	85,38
Program Pengembangan UMKM	6.300.621.261,00	3.851.740.276,00	61,13
Program Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	2.998.500.000,00	2.998.500.000,00	100
Program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat hukum Adat	108.979.800,00	104.658.962,00	96,04
Program Pengelolaan Pendidikan	9.562.466.600,00	9.109.637.585,00	97,77
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	599.507.530,73	544.753.221,00	90,86
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.347.986.248,00	3.798.238.455,00	71

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.267.421.214,00	1.137.026.360,00	90
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	7.032.813.319,00	6.963.267.756,00	99,01
Total	**60.426.315.451,00**	**50.887.241.571,00**	**84,21**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp60.426.315.451,00 terealisasi sebesar Rp50.887.241.571,00 atau 84,21%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp9.539.073.880,00 (15,79%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Rasio Gini (99%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (84,21%) dengan efesiensi 14,79%.

7.3.5.1.3. PDRB Per Kapita



PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per kapita mengindikasikan rata-rata nilai tambah ekonomi suatu daerah yang diterima oleh setiap penduduknya.

Nilai Pendapatan Per Kapita pada Tahun 2025 di Provinsi Kepulauan Riau telah melebihi target yang ditentukan. PDRB Per Kapita pada Tahun 2025 dengan capaian

realisasi sebesar 172.46 Juta dari target sebesar 170,63 – 179,20 Juta (menggunakan target terendah) dan capaian kinerja sebesar 101%.

Perlu kami sampaikan bahwa telah dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja, dimana indikator kinerja yang digunakan tetap sama namun mengalami penyesuaian pada penamaan serta target pencapaiannya. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan organisasi, serta peningkatan akurasi dalam pengukuran kinerja. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Pada Indikator ini perjanjian kinerja murni tahun 2025 menjanjikan pencapaian indikator PDRB per Kapita ADHK dan ADHB dengan target 87,76 juta untuk ADHK dan 143,34 juta untuk ADHB, kemudian perjanjian kinerja mengalami perubahan dengan indikator PDRB Per Kapita dengan target 88,01 – 144,17 Juta.

Pada bagian ini, kami akan menyampaikan hasil analisis atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja terbaru sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi. Analisis ini mencakup tingkat pencapaian setiap indikator, efektivitas pelaksanaan program, serta identifikasi faktor pendukung dan hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai keberhasilan maupun aspek yang masih perlu ditingkatkan, sehingga menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam mencapai target kinerja pada periode berikutnya.

PDRB per kapita mengindikasikan rata-rata nilai tambah ekonomi suatu daerah yang diterima oleh setiap penduduknya. PDRB per kapita sering digunakan sebagai pendekatan pendapatan per kapita penduduk karena ukuran pendapatan per kapita sulit diperoleh.

PDRB per kapita tidak semata-mata mengindikasikan kemakmuran wilayah karena pada kenyataannya distribusi pendapatan suatu wilayah masih belum merata. Ada kelompok masyarakat yang memperoleh pendapatan tinggi, tetapi ada pula yang pendapatannya masih rendah. Meskipun PDRB per kapita suatu wilayah tinggi, tetapi bila tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk juga masih tinggi maka wilayah tersebut belum dapat dikatakan mengalami makmur atau sejahtera. Sehingga, untuk memaknai data PDRB per kapita tidak terlepas dari data dasarnya. Oleh karena itu angka PDRB per kapita dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan data total PDRB. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Data PDRB adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara:

1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya;

2. PDRB atas dasar harga konstan (*riil*) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.
5. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dilihat dari indikator PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan maksimal. Realisasi indikator PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 172,46 Juta dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 170,63 – 179,20 Juta sehingga capaian kinerja sebesar 101% atau dalam kategori "Sangat Baik".

Tabel 7.3.12 Capaian PDRB Per Kapita

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
PDRB Per Kapita	170,63 – 179,20 Juta	172,46 Juta	101%

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Perekonomian Kepulauan Riau tahun 2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp381,73 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp224,51 triliun. Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Jika diukur berdasarkan Perkapita, maka PDRB Perkapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp172,46 Juta, dan atas dasar harga konstran (ADHK) sebesar Rp101,43 Juta.

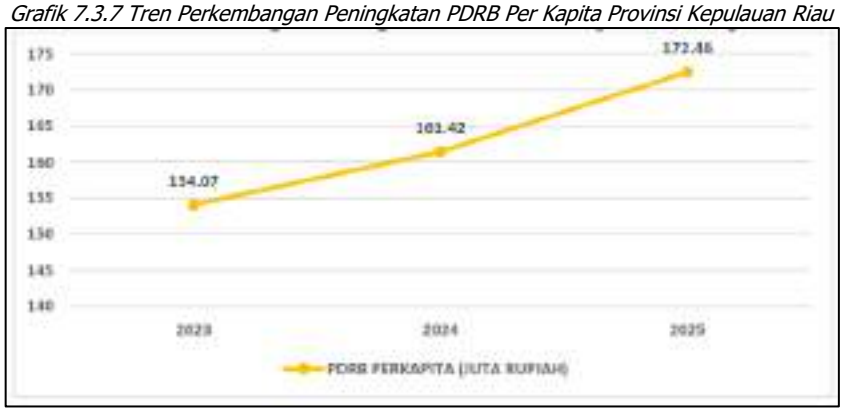
Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan IV-2025 (y-on-y) tumbuh sebesar 7,89%. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan pada triwulan ini didorong oleh kategori Industri Pengolahan yang memiliki andil pertumbuhan sebesar 3,71%. Dari sisi pengeluaran, Komponen Net Ekspor mempunyai andil pertumbuhan sebesar 3,65% dan Komponen PMTB dengan andil sebesar 2,58%.

Ekonomi Kepulauan Riau triwulan IV-2025 dibandingkan dengan triwulan III-2025 (q-to-q) tumbuh sebesar 7,35%. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan oleh kategori Industri Pengolahan dengan andil pertumbuhan terbesar sebesar 4,33%, diikuti kategori Konstruksi dengan andil pertumbuhan sebesar 1,76%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen PK-P memberikan andil pertumbuhan terbesar yaitu 2,52%, diikuti komponen PMTB dengan andil sebesar 1,59%.

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian beberapa Tahun Sebelumnya

PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau meningkat setiap tahunnya. Capaian kinerja peningkatan PDRB Per Kapita tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 11 Juta. Dimana pada tahun 2024 PDRB Per Kapita sebesar 161.42 Juta meningkat menjadi 172.46 Juta pada tahun 2025. Dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 7.3.7 Tren Perkembangan Peningkatan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau

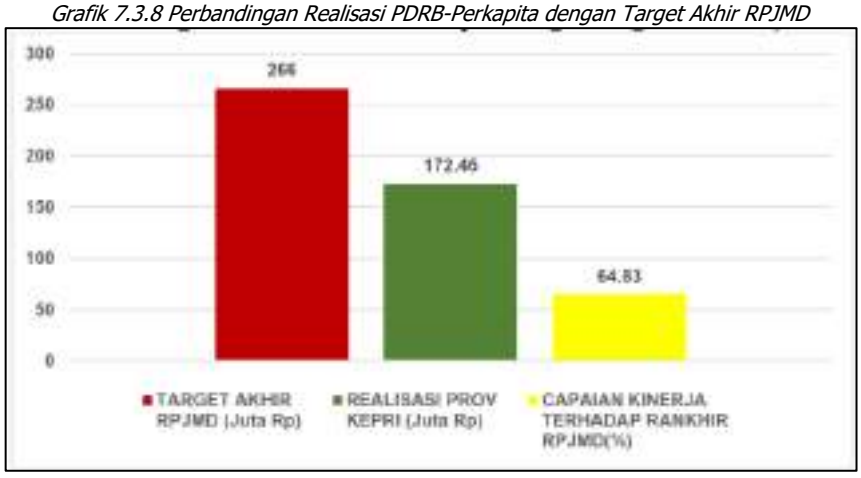


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja PDRB Per Kapita di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 172.46 Juta dengan target sebesar 218.55 - 266.00 Juta (dengan penggunaan target yang tertinggi) sehingga capaian kinerja sebesar 64.83%. Hal ini menunjukan bahwa kedepan perlu upaya yang maksimal dalam pencapaian target RPJMD kedepan.

Grafik 7.3.8 Perbandingan Realisasi PDRB-Perkapita dengan Target Akhir RPJMD



Sumber : Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Pada Tahun 2025, capaian PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan capaian nasional berada dibawah capaian nasional. Dibandingkan Provinsi se-Sumatera tahun 2025, PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau sebesar 172.46 Juta berada pada posisi ke-lima, jika dibandingkan Provinsi se-Wilayah Sumatera.

Tabel 7.3.13 Capaian PDRB Per Kapita

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Aceh	66.251,15	40.198,42	-0,05	-1,61	2,97	4,92
2.	Sumatra Utara	317.402,20	168.392,70	0,13	4,23	4,53	23,52
3.	Sumatra Barat	89.272,71	51.849,62	0,19	1,69	3,37	6,62
4.	Riau	307.557,43	152.957,41	0,12	4,94	4,79	22,79
5.	Jambi	90.808,29	47.980,23	1,30	5,24	4,93	6,73
6.	Sumatra Selatan	183.644,58	100.912,57	-1,13	5,54	5,35	13,61
7.	Bengkulu	29.166,81	14.641,65	3,34	4,79	4,80	2,16
8.	Lampung	131.949,20	74.238,35	-3,06	5,54	5,28	9,78
9.	Kep. Bangka Belitung	31.076,54	16.466,41	4,87	4,54	4,09	2,30
10.	Kepulauan Riau	102.137,24	59.767,12	7,35	7,89	6,94	7,57
	Sumatera	1.349.366,15	727.404,89	0,36	4,54	4,81	100,00

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

E. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berikut penyebab keberhasilan PDRB Perkapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dapat adalah sebagai berikut:

1. Sektor Industri Pengolahan yang Kuat: Sektor industri pengolahan (*manufacturing*) adalah tulang punggung utama ekonomi Kepri, berkontribusi besar terhadap pertumbuhan. Industri di Batam, terutama industri elektronik dan komoditas, tumbuh pesat.
2. Peningkatan Investasi (PMTB): Realisasi investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), terus mengalir ke Kepri, khususnya di sektor industri dan pariwisata. Investasi ini mendorong pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang meningkatkan PDRB dari sisi pengeluaran.
3. Sektor Pertambangan dan Penggalian: Peningkatan aktivitas di sektor ini, termasuk migas dan galian non-migas (granit, pasir, kuarsa), berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi, khususnya pada triwulan III-2025.
4. Kenaikan Aktivitas UMKM dan Perdagangan: Pemulihan dan peningkatan aktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor perdagangan turut menjadi motor penggerak ekonomi.
5. Pertumbuhan Sektor Konstruksi: Pembangunan infrastruktur dan proyek konstruksi yang masif, terutama di kawasan industri Batam, mendukung pertumbuhan PDRB.

Dalam mendukung ketercapaian dan peningkatan PDRB per kapita, Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya-upaya, sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana dan prasarana penangkapan serta budidaya ikan di laut sebanyak **5.321 unit** yang diberikan kepada nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil, Program tersebut juga berpengaruh terhadap peningkatan tingkat kesejahteraan nelayan yang diukur melalui **Nilai Tukar Nelayan (NTN)** sebesar **104,29** dan **Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)** sebesar **91,49**

Penyediaan Sarpras Penangkapan Budidaya Ikan Laut



Sumber : DPKP Prov Kepri

2. Memberikan jaminan perlindungan sosial melalui **BPJS Ketenagakerjaan** kepada **31.304 nelayan kecil**

Pemberian Secara Simbolis BPJS Ketenagakerjaan Nelayan



Sumber : DPKP Prov Kepri

Kepri International Art & Culture 2025



Sumber : DPKP Prov Kepri

3. Menyelenggarakan event pariwisata yang berkualitas di kabupaten/kota, dan Melakukan promosi pariwisata baik melalui media cetak, elektronik

4. Meluncurkan Program JIWA, merupakan hasil kolaborasi antara Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Pemprov Kepri, serta pelaku industri pariwisata pameran untuk menikmati diskon khusus antara 10 hingga 30 % di 33 layanan wisata.

Peluncuran Program JIWA



Sumber : Dinas Pariwisata Prov Kepri

5. Peningkatan kapasitas/ pelatihan bagi 50 (lima puluh) tenaga kerja bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

6. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual bagi 60 (enam puluh) pelaku ekonomi kreatif dan Sertifikasi bagi 40 (empat puluh) tenaga kerja bidang pariwisata;

7. Program peningkatan mutu dan standarisasi usaha diantaranya adalah pembuahan NIB, Sertifikasi Halal, izin edar, PIRT yang diberikan gratis kepada pelaku usaha, tercatat 250 sertifikasi halal yang dibiayai melalui APBD Provinsi Kepulauan Riau dan 20 sertifikat uji mutu produk

8. Selain diberikan pendampingan usaha secara inklusif melalui Lembaga yang di bentuk bernama Inkubator Bisnis Merah Putih dengan pendampingan intensif, pelatihan, boothcamp, dan juga business matcing baik dengan buyer dalam negeri juga luar negeri dengan program Kepri – ASEAN Business Forum yang memiliki potensi transaksi senilai Rp. 4.013.010.000

9. Permodalan bagi UMKM melalui program subsidi margin 0% dengan bantuan permodalan bagi para pengusaha UMKM hingga Rp. 40.000.000,-, yang bekerjasama dengan Bank Riau Kepri, tercatat 328 nasabah baru penerima manfaat bantuan modal subsidi margin dengan nilai plafon Rp. 11.347.000.000,- bahwa keunggulan dari program ini adalah para nasabah pengusaha UMKM penerima manfaat tidak perlu membayar bunga atau hanya membayar pokok pinjaman saja hingga 2 tahun. Selain itu juga difasilitasi melalui lembaga keuangan lainnya untuk meningkatkan permodalan seperti perbankan dan LPDB.

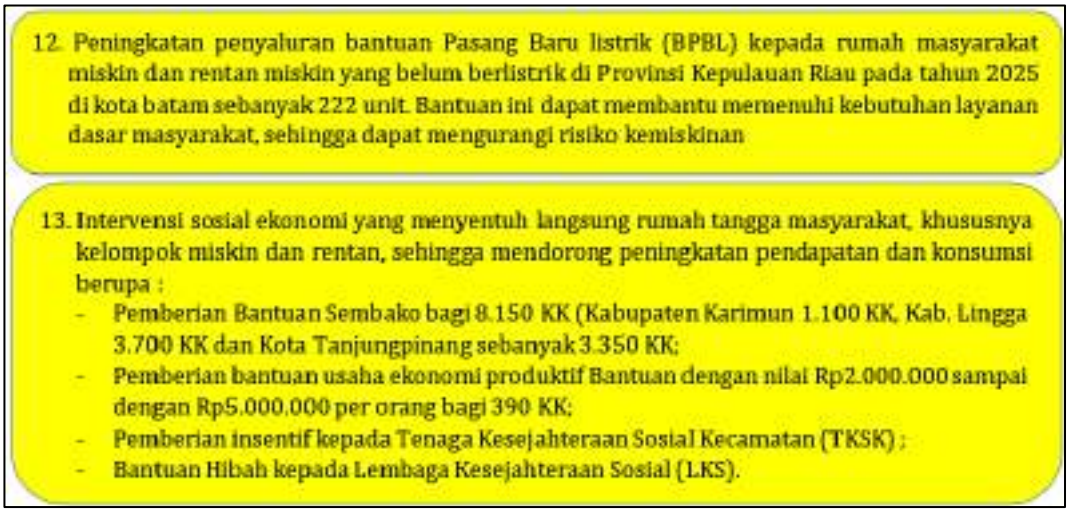
10. Pendampingan usaha bagi pengusaha mikro dan kecil juga pelatihan berjenjang yang diberikan khusus pada 2 lokasi prioritas yaitu Batam dan Bintan sebagai pendorong usaha sebagai rantai pasok industri serta Peningkatkan dan market dan kemitraan dengan baik secara konvensional maupun online sebagai bentuk promosi.

11. Intervensi pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha miktro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk telibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan di wilayah pedesaan melalui Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Tabel 7.3.14 Data Pendirian dan Pemeringkatan BUMDes Tahun 2025

No	Kabupaten	Jml Desa	Jml Pendirian BUMDes	%	Tidak ada Bumdes	PEMERINGKATAN				TOTAL	%
						Perintis	Pemula	Berkembang	Maju		
1	BINTAN	36	36	100%	0	10	2	13	5	30	83%
2	KARIMUN	42	42	100%	0	9	21	11	1	42	100%
3	NATUNA	70	70	100%	0	43	21	6	0	70	100%
4	LINGGA	75	75	100%	0	64	6	5	0	75	100%
5	KEP. ANAMBAS	52	51	98,08%	1	41	8	1	0	50	98%
	TOTAL	**275**	**274**	**99.64%**	**1**	**167**	**58**	**36**	**6**	**267**	**97%**

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Riau



Dalam pelaksanaan terdapat permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan PDRB Per Kapita, sebagai antara lain:

1. Bantuan sarana prasarana penangkapan ikan dan budidaya ikan di laut belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh nelayan kecil/pembudidaya kecil yang membutuhkan sarana untuk peningkatan usaha perikanan bagi pelaku usaha perikanan, serta masih banyak Nelayan/pembudidaya kecil yang belum sepenuhnya mampu untuk mengelola keuangan sehingga masih sulit untuk mengembangkan usahanya;
2. Masih minimnya akses ke Kabupaten Natuna, Anambas, dan Lingga sebagai salah satu penyebab timpangnya perjalanan wisatawan;
3. Mahalnya tiket transportasi juga menjadi hambatan optimalnya kunjungan wisatawan;
4. Masih minimnya fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif dan masih minimnya sertifikasi dan peningkatan kapasitas bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. Sebagian besar UMKM masih berada pada skala mikro–kecil sehingga produktivitas Rendah yang menyebabkan kontribusi UKM terhadap PDRB relatif kecil;
6. Masih banyak UMKM bergerak pada sektor perdagangan eceran, kuliner skala kecil dan penyediaan jasa sederhana dan belum masuk ke sektor pengolahan, industri kreatif bernilai tinggi, atau ekspor, padahal sektor-sektor tersebut berpotensi meningkatkan PDRB secara signifikan;
7. Rendahnya kualitas SDM dan Manajemen Usaha Pelaku UMKM sehingga membatasi pertumbuhan usaha dan menahan peningkatan nilai tambah;
8. Keterbatasan keberlanjutan usaha ekonomi produktif dan tantangan akurasi data sosial ekonomi;
9. Kondisi BUMDes sebagian besar masih lemah secara administrasi, pembukuan dan laporan keuangan, sebagian besar usaha dijalankan tanpa analisa kelayakan

usaha, tidak mempunyai program kerja, modal BUMDes masih didominasi dari penyertaan modal desa.

F. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan PDRB Per Kapita dan mengurangi permasalahan dan kedala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepanya sebagai berikut:

1. Bantuan sarana dan prasarana perikanan tetap dilanjutkan dan disalurkan secara lebih tepat sasaran untuk membantu nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil dalam menekan biaya atau ongkos produksi. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan lahan budidaya akan terus didorong melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, serta pemberian bantuan, guna meningkatkan minat, daya tarik, dan potensi pengembangan subsektor perikanan budidaya;
2. Untuk lebih meningkatkan kunjungan wisatawan mengoptimalkan Promosi pariwisata di berbagai chanel media dan memperbanyak atraksi wisata untuk memberikan kenyamanan wisatawan sehingga memperpanjang lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau yang pada akhirnya dapat menambah pengeluaran wisatawan khususnya terkait akomodasi dan makan minum;
3. Memperbanyak fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif dan meningkatkan kapasitas/ keahlian tenaga kerja bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Fasilitasi dan pendampingan penerbitan legalitas usaha, kualitas dan sertifikasi produk UMKM agar mampu berdaya saing serta pendampingan usaha kepada pelaku UMKM dan Fasilitasi akses pembiayaan untuk UMKM dengan penyediaan Subsidi Margin bagi Pelaku UMKM;
5. Upaya penguatan pemutakhiran dan integrasi Data Sosial Ekonomi dan peningkatan kualitas program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui pendampingan usaha dan peningkatan keterampilan, serta penguatan sinergi lintas sektor agar program sosial semakin terintegrasi dengan kebijakan pembangunan ekonomi daerah;
6. Pengembangan kapasitas Pengurus Bumdes dan pembentukan BUMDes bagi wilayah yang belum terbentuk.

G. Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Tabel 7.3.15 Program dan Realisasi Anggaran yang Mendukung PDRB per Kapita Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Perekonomian dan Pembangunan	351.320.920,00	337.295.059,00	96,01
Program Pemasaran Pariwisata	7.758.633.839,00	5.647.330.979,00	73
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.307.813.811,00	1.253.032.729,00	96
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	359.750.700,00	327.445.933,00	77

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Pemberdayaan UMKM	17.068.663.172,00	14.573.871.921,00	85
Program Pengembangan UMKM	6.300.621.261,00	3.851.740.276,00	61
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3.757.605.625,00	3.530.534.795,00	94
Program Pemberdayaan Sosial	600.895.841,00	596.713.086,00	99
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	108.979.800,00	104.658.962,00	96
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	13.496.177.809,00	12.947.287.223,00	96
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.887.067.836,00	2.746.081.044,00	95
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	955.998.870,00	853.590.983,00	89
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.347.986.248,00	3.798.238.455,00	71
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.267.421.214,00	1.137.026.360,00	90
Total	**61.568.936.946,00**	**51.704.847.805,00**	**83,98**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp61.568.936.946,00 terealisasi sebesar Rp51.704.847.805,00 atau 83,98%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp9.864.089.141,00 (16,02%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja PDRB Per Kapita (101%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (83,98%) dengan efesiensi 17,02%.

7.3.5.2. Sasaran Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Berbasis Digital

7.3.5.2.1. Indeks Reformasi Birokrasi



Reformasi Birokrasi merupakan sebuah upaya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik guna mempercepat proses pembangunan nasional sampai ke daerah. Tata kelola pemerintahan berimplikasi erat pada bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat yang merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025 meningkat dengan capaian kinerja sebesar A- (84,62 Indeks) dari target sebesar A- (80-100 Indeks) dan terealisasi sebesar 105% (menggunakan target terendah).

Perlu kami sampaikan bahwa telah dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja, di mana indikator kinerja yang digunakan tetap sama namun mengalami penyesuaian pada sasaran kinerja yang sasaran semula Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Kuat dan Antisipatif menjadi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik Yang Berbasis Digital. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan organisasi, serta peningkatan akurasi dalam pengukuran kinerja. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Pada Indikator ini perjanjian kinerja murni tahun 2025 menjanjikan pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan target 71,51 Indeks, kemudian perjanjian

kinerja mengalami perubahan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan target menjadi A -.

Pada bagian ini, kami akan menyampaikan hasil analisis atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja terbaru sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi. Analisis ini mencakup tingkat pencapaian setiap indikator, efektivitas pelaksanaan program, serta identifikasi faktor pendukung dan hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai keberhasilan maupun aspek yang masih perlu ditingkatkan, sehingga menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam mencapai target kinerja pada periode berikutnya.

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah upaya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik guna mempercepat proses pembangunan nasional sampai ke daerah. Tata kelola pemerintahan berimplikasi erat pada bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat yang merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Semakin baik tata kelola pemerintahan, maka semakin baik pula pelayanan kepada masyarakat serta percepatan pembangunan dapat terwujud.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital dilihat dari indikator indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Realisasi indikator indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar A- (84,62 Indeks) dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar A- (80- 100 Indeks) sehingga capaian kinerja sebesar 105% (menggunakan target terendah) atau dalam kategori “Sangat Baik.”

Tabel 7.3.16 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Reformasi Birokrasi	A- (80-100 Indeks)	A- (84,62 Indeks)	105%

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berikut informasi Pencapaian Indeks Reformasi didukung dari pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi General:

Tabel 7.3.17 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

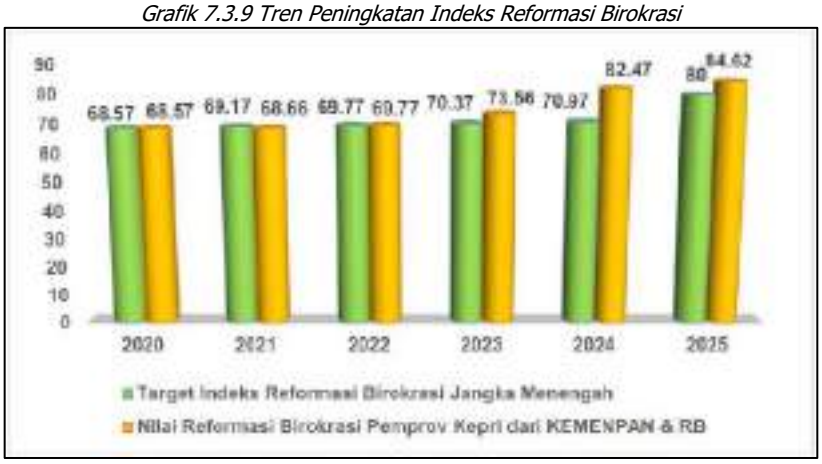
Sasaran	Indikator	Target	Capaian
Terimplementasikannya Kebijakan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN dengan Baik	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	5	4
Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	0
	Indeks SPBE	3,07	3,27
Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegritasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Perencanaan Pembangunan	91,30	92,28
	Nilai SAKIP	78,37	78,35
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0,75	1,5

Sasaran	Indikator	Target	Capaian
	Tingkat Maturitas SPIP	3,45	2,77
	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	4,00	4,00
	Hasil Survei Penilaian Integritas	74,23	74,61
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Dan Regulasi	Indeks Reformasi Hukum	97,00	97,10
	Indeks Kualitas Kebijakan	50,20	74,33
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral	Tingkat Digitalisasi Arsip	90,60	88,94
	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,8	2,61
Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Indeks Tata Kelola Pengadaan	91,40	92,70
	Opini BPK	WTP	WTP
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	89,25%	89,27%
Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Indeks Sistem Merit	332	330,50
Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN Yang Efektif Dan Efisien			
Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja			
Terwujudnya Rekrutmen Pegawai ASN yang Efektif dan fisien			
Terwujudnya percepatan tranformasi digital manajemen ASN			
Terwujudnya Percepatan Peningkatan Kapasitas Pegawai ASN			
Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Sistem Merit Dan Sistem Manajemen ASN	Indeks BerAkhlak	74,00	73,54
Terwujudnya pelayanan publik secara prima	Survey Kepuasan Masyarakat(SKM)	87,00	87,37
	Indeks Pelayanan Publik	4,30	4,48
	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	91,45	90,45

Sumber : Kementerian PAN dan RB

B. Perbandingan Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Grafik 7.3.9 Tren Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi



Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau

Dapat dilihat pada grafik diatas, Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan setiap tahunnya mulai tahun 2023.

Capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,15 Indeks Dimana pada tahun 2024 Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,47 indeks meningkat menjadi 84,62 (A-) indeks pada tahun 2025.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja Indeks Reformasi Birokrasi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar A- (84,62 Indeks)dengan target sebesar A- (80-100 Indeks) sehingga capaian kinerja sebesar 105% (menggunakan target terendah).

Grafik 7.3.10 Perbandingan Realisasi RB Tahun 2025 dengan Target RPJMD



Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau

D. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian indeks RB Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau didukung Tim Pelaksana Reformasi Biorkrasi yang bertugas menyusun rencana aksi dan mengkoordinir ketercapaian sasaran Reformasi Birokrasi general dan Tematik yang terbagi pada beberapa perangkat daerah penanggungjawab Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2025 sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2025 mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan "*double track*", yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan "*RB General*", serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan "RB Tematik". Adapun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 terdiri dari beberapa Tema:

1. Pengentasan Kemiskinan;
2. Peningkatan Investasi;
3. Mendorong Hilirisasi;
4. Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan;

5. Mendukung Ketahanan Nasional;
6. Mendorong Peningkatan Akses;
7. Kualitas dan Mutu Pendidikan.

Upaya dalam mendukung ketercapaian sasaran RB General sebagai berikut:

1. Terimplementasikannya Kebijakan Sistem Kerja Baru Dengan Model Fleksibel Bagi Pegawai ASN Dengan Baik

Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai: Dalam rangka terimplementasinya Kebijakan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya dengan Bimbingan Teknis serta menyusun Peta proses bisnis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

2. Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional

Indeks SPBE: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak lainnya. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Tujuannya bukan sekadar "komputerisasi" kantor, melainkan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Grafik 7.3.11 Perkembangan Capaian Indeks SPBE Provinsi Kepulauan Riau



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di tahun 2025, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

a. Meningkatkan Keamanan siber: Melindungi data sensitif pemerintah dari ancaman siber luar;

b. Efisiensi: Mengurangi biaya langganan internet di tiap Perangkat Daerah dengan menggunakan akses komunikasi terpusat;

c. Interoperabilitas: Memudahkan aplikasi satu dinas terintegrasi dengan aplikasi dinas lainnya;

d. Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE): Mempercepat birokrasi sekaligus menjamin keaslian dokumen digital melalui kerja sama dengan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BsrE);

e. Audit Keamanan Berkala: Melakukan penetration *testing* pada aplikasi-aplikasi vital untuk mencegah kebocoran data yaitu aplikasi *website* JDIH biro hukum dan juga *website* portal Kepriprov;

f. Rekrutmen Tenaga Ahli: Rekrutmen *Programmer* dilakukan dalam rangka mendukung pemerintahan berbasis elektronik.

3. Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegritasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas

Indeks Perencanaan Pembangunan: Secara umum, kualitas kinerja pencapaian, dokumen perencanaan sudah baik tetapi masih perlu terus ditingkatkan, adapun hal- hal yang mendukung capaian tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Pengendalian dan Evaluasi Capaian Hasil Perencanaan Pembangunan

b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah

Dalam memastikan kualitas dan keselarasan dokumen Perencanaan telah dilaksanakan antara lain:

a. Pendampingan/asistensi yang intensif kepada Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan indikator kinerja dan *Cascading* kinerja;

b. Koordinasi dan Komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Pusat dalam upaya keselarasan dan keterpaduan perencanaan dengan Pusat khususnya dukungan/kontribusi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau terhadap Asta Cita serta penyelarasan target indikator Makro;

c. Melibatkan secara aktif berbagai pihak/*stakeholder* dalam proses perencanaan untuk memperkaya masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Diantaranya melalui pelaksanaan konsultasi publik dan Musrenbang.

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Upaya dalam mendukung ketercapaian Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kepulauan Riau:

a. Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja

1) Meningkatkan kualitas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, memverifikasi rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang salah satunya

mengarahkan sasaran strategis dan IKU Perangkat Daerah agar berorientasi hasil dan tepat menjadi kinerja utama kepala Perangkat Daerah;

2) Memperkuat kesinambungan kinerja antar *Level* Jabatan melalui Perjanjian Kinerja;

3) Memperkuat Rencana Aksi Perangkat Daerah;

4) Memperkuat Upaya Pengukuran Rencana Aksi Perangkat Daerah dan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi (*Monev*) Rencana Aksi Tahun 2025 sesuai format pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2024.

b. Komponen Pelaporan Kinerja

1) Meningkatkan Kualitas Laporan Kinerja Instansi yang menunjukan kinerja Pemerintah, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014;

2) Melakukan Pembinaan dan pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah. hasil evaluasi komponen Pelaporan kinerja Perangkat Daerah sesuai evaluasi SAKIP internal oleh Inspektorat Daerah sebagai berikut: 33 Perangkat Daerah Nilai diatas 8 dan 1 Perangkat Daerah Nilai dibawah. Sehingga dapat simpulkan persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja sesuai ketentuan mencapai 97%.

c. Komponen Evaluasi Internal Penerapan SAKIP

1) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, upaya yang dilaksanakan Inspektorat Daerah dalam rangka peningkatan kualitas Implementasi SAKIP pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada aspek Evaluasi Internal adalah:

Tabel 7.3.18 Hasil Nilai SAKIP dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI SAKIP	KATEGORI	NILAI PKO	PREDIKAT KINERJA
1	Dinas Ketahan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	86,54	A	100%	BAIK
2	Sekretariat Daerah	83,28	A	106,26	ISTIMEWA
3	Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau	82,99	A	102,93	ISTIMEWA
4	Dinas Kesehatan	82,91	A	82,91	BAIK
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	81,76	A	100,08	ISTIMEWA
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	81,6	A	104,2	ISTIMEWA
7	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	81,49	A	90,33	BAIK
8	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	80,95	A	101,19	ISTIMEWA
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	79,74	BB	87,77	BAIK
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	79,71	BB	92,74	BAIK
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	79,71	BB	89,92	BAIK

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI SAKIP	KATEGORI	NILAI PKO	PREDIKAT KINERJA
12	Sekretariat DPRD Provinsi Kep. Riau	79,37	BB	87,31	BAIK
13	Dinas Sosial	78,88	BB	90	BAIK
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	78,66	BB	91,9	BAIK
15	Badan Pendapatan Daerah	77,58	BB	92,05	BAIK
16	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	77,44	BB	86,64	BAIK
17	Dinas Kebudayaan	77,34	BB	89,59	BAIK
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	77,28	BB	86,11	BAIK
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	77,21	BB	93,95	BAIK
20	Dinas Pariwisata	76,58	BB	99	BAIK
21	Dinas Pendidikan	76,48	BB	97,17	BAIK
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75,81	BB	94,37	BAIK
23	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	75,47	BB	69,44	BUTUH PERBAIKAN
24	Dinas Energi dan Sumber Daya manusia	74,59	BB	91,11	BAIK
25	Badan pengembangan Sumber Daya Manusia	73,92	BB	90	BAIK

Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

2) Pemantauan Tindak Lanjut dalam rangka memastikan saran-saran perbaikan yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi telah ditindaklanjuti dan berdampak pada perbaikan kinerja. Berdasarkan hasil pemantauan, diketahui rata-rata persentase saran yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah adalah sebesar 70% dari 190 rekomendasi, 11% rekomendasi belum tuntas dan sebanyak 19% belum ditindaklanjuti.

4. Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas: Sesuai Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 308 Tahun 2025 sebanyak 5 Perangkat Daerah/Unit Kerja Penunjukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, terdapat 4 (empat) Unit Pelayanan Publik yang diajukan untuk mendapat Predikat WBK/WBBM yaitu, Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib, Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI. Dari Unit Pelayanan Publik yang diajukan tersebut, terdapat 2 (Unit Pelayanan Publik) yang dapat maju sampai ke tahap survey lapangan yang merupakan tahapan akhir dari proses penilaian WBK dan WBBM. Faktor -faktor keberhasilan capaian indikator, sebagai berikut:

a. Evaluasi telah dilaksanakan atas capaian tahun sebelumnya, dan menjadi dasar perbaikan pembangunan Zona Integritas pada tahun 2025;

b. Meningkatnya koordinasi antar Perangkat Daerah Pengampu seperti Biro Organisasi dan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan penilaian;

c. Unit Pelayanan Publik memiliki komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kualitas Pembangunan Zona Integritas dengan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.

Tingkat Maturitas SPIP: Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP atas penilaian level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dituangkan dalam LHE Nomor : PE.09.03/SP-11207/PW28/3/2025 bahwa level maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berada pada level 2 (Berkembang). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum sepenuhnya mampu mendefinisikan kinerja dan strategi pencapaian kinerjanya dengan baik. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, terjadi penurunan sebesar 0,25 poin (capaian 2024 sebesar 3.100).

Terdapat 3 (tiga) komponen penilaian yaitu : Penetapan Tujuan terdiri dari 2 (dua) unsur, Struktur dan Proses terdiri dari 5 (lima) unsur dan 25 (dua puluh lima) sub unsur dan Komponen pencapaian tujuan SPIP yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 5 (lima) sub unsur. Berdasarkan LHe tersebut, terdapat kelemahan pada penilaian sub unsur komponen Struktur dan Proses yang hanya mencapai 2,651 serta pada sub unsur komponen Pencapaian tujuan SPIP.

Berikut disampaikan beberapa kelemahan dalam Pencapaian Maturitas SPIP Provinsi Kepulauan Riau:

a. Lemahnya koordinasi antara Perangkat Daerah yang mengampu SPIP;

b. Kurangnya pemahaman secara menyeluruh tentang SPIP pada Perangkat Daerah;

c. Kualitas dokumen perencanaan belum optimal, masih terdapat indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria *SMART*;

d. Implementasi Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih belum optimal;

e. Kompetensi tim penilaian mandiri SPIP belum memadai.

Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan: Upaya Pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui Aplikasi SP4N-LAPOR! Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau amanat dari Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (1), (2) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah. Berikut rekapitulasi pengaduan berdasarkan klasifikasi laporan terhadap 89 aduan yang terdisposisi:

Tabel 7.3.19 Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi

No	Klasifikasi Laporan berdasarkan aduan terdisposisi	Jumlah (aduan)	%
1	Aspirasi	10	12%
2	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	66	74%

No	Klasifikasi Laporan berdasarkan aduan terdisposisi	Jumlah (aduan)	%
3	Pengaduan Berkadar Pengawasan	13	14%

Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 7.3.20 Tindaklanjut Aduan Masyarakat Aplikasi SP4N-LAPOR! Per November 2025

No	Pengelolaan Aduan Masuk	Jumlah	%
1	Belum terverifikasi	0	0%
2	Terdisposisi belum ditindaklanjuti	0	0%
3	Terdisposisi sedang diproses	13	14%
4	Terdiposisi sudah selesai	81	86%
Jumlah		**94**	

Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Dari seluruh aduan yang masuk dan terverifikasi pada periode tahun 2025, rata-rata laju verifikasi aduan oleh admin instansi adalah 1.4 hari. Dari seluruh aduan, 90.5% aduan diverifikasi kurang dari 3 hari dan 9.5% aduan diverifikasi lebih dari 3 hari. Sementara rata-rata laju tindak lanjut oleh admin penghubung yaitu 3.2 hari. Total 83.3% aduan ditindaklanjuti kurang dari 5 hari dan 16.7% aduan ditindaklanjuti lebih dari 5 hari.

Hasil Survei Penilaian Integritas: Survey Penilaian Integritas merupakan sebuah survey nasional dari KPK untuk mengukur tingkat integritas dan potensi korupsi di instansi publik melalui persepsi dan pengalaman pengguna layanan, pegawai, serta ahli, guna mendorong perbaikan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 74,61 dan berada di atas rata-rata nasional. Jika dibandingkan dengan skor tahun 2024 (kategori Rentan), terjadi kenaikan skor sebesar 2,95 poin (Kategori “Waspada”).

Tabel 7.3.21 Hasil Survey Penilaian Integritas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Komponen	Skor
1	Internal	73,66
2	Eksternal	88,3
3	Ekspert	64,2
4	Faktor Koreksi (Pengurang Nilai)	
4.1	Pelaksanaan SPI	0,38
4.2	Fakta Koreksi	0

Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Jika dilihat pada tabel tersebut, skor terendah terdapat pada komponen Eksper yaitu 64,2 dan skor tertinggi terdapat pada komponen eksternal yaitu sebesar 88,3. Pada komponen Eksper terdapat 2 bidang penilaian yaitu Kelompok Pemantau Mewakili Publik dengan capaian skor sebesar 59,33 dan Bidang Kelompok Pengamat Melekat dengan capaian skor sebesar 73,14. Hal ini menunjukkan bahwa program pencegahan korupsi pada pemerintah provinsi Kepulauan Riau masih belum terinformasikan dan berdampak pada kalangan eksper.

Faktor keberhasilan atas peningkatan capaian indikator Survei Penilaian Integritas adalah:

a. Penguatan fungsi pendampingan atas survei integritas yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah kepada Perangkat Daerah;

b. Komiten Kepala Perangkat Daerah melakukan perbaikan sesuai hasil Rencana Aksi Peningkatan SPI;

c. Perbaikan Pelayanan Publik dilaksanakan oleh Unit-unit Pelayanan Publik sehingga meningkatkan kepuasan pengguna layanan.

5. Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi

Indeks Kualitas Kebijakan: Indeks Kualitas Kebijakan mengukur mutu kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan bukti nyata, fokus pada dampak pembangunan strategis, melalui penilaian mandiri (*self-assessment*) terhadap proses perencanaan, implementasi, evaluasi, keberlanjutan, serta transparansi dan partisipasi publik. Tujuannya agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran, menyelesaikan masalah publik, serta meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

Tabel 7.3.22 Perkembangan capaian Indeks Kualitas Kebijakan

Indeks Kualitas Kebijakan	Hasil Penilaian		
	2023	2024	2025
	0	10 (kurang)	74,33 (Baik)

Sumber : Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau

Peningkatan pencapaian ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu:

a. Pembentukan tim Pengukuran Kualitas Kebijakan Pemerintah Provinsi KEPRI;

b. Penglibatan aktif Fungsional Analis Kebijakan;

c. Rapat Koordinasi Pemenuhan Instrumen IKK.

Indeks Reformasi Hukum: Keberhasilan pengukuran Indeks Reformasi Hukum menunjukan peningkatan yang sangat Baik, hal ini menunjukan penguatan komitmen terhadap tata kelola harmonisasi kebijakan, penguatan tata kelola regulasi dan memperkuat koordinasi antara berbagai tingkatan pemerintahan serta OPD Pemrakarsa selaku pemangku kepentingan Pencapaian keberhasilan pengukuran Indeks Reformasi Hukum menunjukan peningkatan.

Tabel 7.3.23 Perkembangan capaian Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum	Hasil Penilaian		
	2023	2024	2025
	-	96,42	97,10

Sumber : Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan Indeks Reformasi Hukum sebagai berikut:

a. Koordinasi dan Harmonisasi Regulasi: Penguatan koordinasi dengan Kemenkumham untuk harmonisasi.

b. Re-regulasi dan Deregulasi: Peninjauan, penyederhanaan, dan penghapusan peraturan yang tidak perlu.

c. Peningkatan Kompetensi Perancang Peraturan: Peningkatan SDM di bidang perancangan perundang-undangan (*legal drafter*).

d. Penataan *Database* Peraturan: Pemutakhiran dan pengelolaan data peraturan yang terstruktur.

6. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral

Tingkat Digitalisasi Arsip: Dilihat perkembangan hasil penilaian tingkat digitalisasi arsip mengalami penurunan pada tahun 2025, namun dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan upaya pengolahan arsip statis, mengalih mediakan arsip statis yang ada diruang penyimpanan depot arsip statis serta melakukan penginputan arsip alih media ke Aplikasi JIKN. Berikut informasi perkembangan capaian Digitalisasi arsip Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 7.3.24 Perkembangan Capaian Tingkat Digitalisasi Arsip

Digitalisasi Arsip	Hasil Penilaian		
	2023	2024	2025
	90,4	90,5	89

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau

Kendala yang dihadapi dihadapi dalam meningkatkan digitalisasi arsip Pada tahun 2023 aplikasi SIKN JIKN down, sehingga simpul tidak dapat melakukan input. Data yang masih tersimpan di versi lama (ATOM) belum dapat dimigrasikan, belum dilakukan sosialisasi kebijakan tentang penerapan srikandi, Kode Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral: Selanjutnya dalam meningkatkan pembangunan statistik sektoral Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Walidata, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau selaku Pembina Data melaksanakan Identifikasi Kegiatan Statistik pada Produsen Data.

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 57 kegiatan statistik sektoral dengan total 111 indikator statistik yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah serta memberikan pendampingan teknis kepada Perangkat Daerah selaku Produsen Data dalam penyusunan metadata kegiatan statistik sektoral sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Metadata Statistik.

Adapun ringkasan hasil penyusunan metadata statistik yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Metadata statistik yang telah diinput : 44 metadata

b. Metadata statistik dengan status draft : 2 metadata

c. Metadata statistik dengan status submit : 1 metadata

d. Metadata statistik yang telah disetujui Pembina Data : 33 metadata

e. Metadata statistik yang memerlukan perbaikan : 4 metadata

f. Metadata statistik yang masih dalam proses pemeriksaan : 4 metadata.

Tabel 7.3.25 Capaian Indeks Pembangunan Statistik Sektoral Provinsi Kepulauan Riau

Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Hasil Penilaian		
	2023	2024	2025
	1,9	2,61	Tidak Dilaksanakan Penilaian

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau

7. Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Indeks Tata Kelola Pengadaan: Dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Penguatan regulasi dan kepatuhan, Menyusun dan menerapkan kebijakan pengadaan dan Memastikan seluruh proses pengadaan mematuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan;

b. Peningkatan kapasitas SDM, Pelatihan dan sertifikasi bagi pelaku pengadaan dan Pembinaan berkelanjutan terkait etika, integritas, dan kompetensi teknis pengadaan;

c. Pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik, data dan dokumen pengadaan secara tertib dan tepat waktu;

d. Perencanaan pengadaan yang baik, Penyusunan RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang akurat, realistis, dan tepat waktu;

e. Penguatan pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi rutin atas proses dan hasil pengadaan;

f. Peningkatan transparansi dan akses info, publikasi informasi pengadaan secara terbuka dan mudah diakses dan Penyediaan kanal pengaduan yang efektif dan responsif;

g. Penerapan manajemen risiko pengadaan, Identifikasi dan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kontrak.

Tabel 7.3.26 Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Provinsi Kepulauan Riau

Indeks Tata Kelola Pengadaan	Hasil Penilaian		
	2023	2024	2025
	90,11	91,35	92,70

Sumber : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kepulauan Riau

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan, diantaranya adalah :

a. Kualitas dan Kuantitas SDM Pengadaan, kurangnya SDM bersertifikat dan berpengalaman;

b. Perencanaan Pengadaan yang Lemah, RUP tidak disusun tepat waktu atau tidak akurat dan Spesifikasi teknis tidak berbasis kebutuhan nyata;

c. Kepatuhan terhadap Regulasi, Kurangnya pemahaman terhadap aturan terbaru pengadaan dan Proses pengadaan belum sepenuhnya sesuai SOP;

d. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Elektronik, *E-Procurement* belum dimanfaatkan secara optimal dan Integrasi sistem pengadaan dengan sistem lain masih lemah;

e. Pengendalian dan Pengawasan, tindak lanjut hasil audit/temuan masih rendah dan pengendalian risiko pengadaan belum berjalan efektif;

f. Transparansi dan Akuntabilitas, informasi pengadaan belum sepenuhnya terbuka dan potensi konflik kepentingan masih ada;

g. Budaya Organisasi, Resistensi terhadap perubahan dan digitalisasi dan pengadaan masih dipandang sebagai proses administratif.

Opini BPK: Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dipertahankan sebanyak 15 kali berturut-turut menunjukan konsistensi tata kelola keuangan daerah yang patuh regulasi, didukung oleh komitmen pimpinan dan penguatan sistem pengendalian internal secara berkelanjutan , dengan upaya dan inovasi yang dilakukan sebagai berikut:

a. Penguatan Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Daerah secara konsisten menerapkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual;

b. Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan BKAD melakukan pembinaan dan pendampingan secara intensif kepada seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan laporan keuangan;

c. 3Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BKAD berperan aktif dalam mendorong penerapan SPIP secara konsisten, baik melalui penyusunan kebijakan, penguatan prosedur kerja, maupun koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk meminimalkan risiko kesalahan dan ketidakpatuhan;

d. Optimalisasi Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah Upaya penertiban, inventarisasi, dan penilaian aset daerah dilakukan secara berkelanjutan;

e. Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah secara terintegrasi dan berbasis elektronik untuk meningkatkan akurasi data, transparansi, serta ketepatan waktu penyajian laporan keuangan melalui implementasi SIPD;

f. Mendorong peningkatan kompetensi ASN pengelola keuangan melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, serta pengembangan jabatan fungsional yang relevan.

8. Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional, Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN Yang Efektif Dan Efisien, Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja, Terwujudnya Rekrutmen

Pegawai ASN yang Efektif dan efisien, Terwujudnya percepatan tranformasi digital manajemen ASN dan Terwujudnya Percepatan Peningkatan Kapasitas Pegawai ASN

Indeks Sistem Merit: Upaya dalam mendukung ketercapaian indikator Indeks Sistem Merit Provinsi Kepulauan Riau yakni dengan peningkatan penataan manajemen ASN, sebagai berikut:

a. Komitmen terhadap penerapan Manajemen Talenta dalam penyelenggaraan manajemen ASN, dengan membangun manajemen talenta berbasis digital yakni "Talenta Kepri" yang terintegrasi dengan aplikasi layanan kepegawaian, Melaksanakan talent pool dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, membangun Infrastruktur Manajemen Talenta;

b. Mengintegrasikan aplikasi SILAT dengan MYASN dalam rangka pelayanan kepegawaian secara elektronik dapat dilakukan dengan cepat dan efisien serta Pengembangan aplikasi Sistem Manajemen Kinerja ASN berbasis aplikasi (SIMANJA) dalam rangka pemantauan kinerja ASN;

c. Pelaksanaan Pengangkatan ASN dalam rangka pemenuhan kebutuhan pegawai, dengan rincian CPNS sebanyak 78 Orang, PPPK sebanyak 4.231 Orang dan PPPk Paruh Waktu Sebanyak 1.449 Orang;

d. Pengembangan kompetensi ASN, berupa Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Sosiokultural diikuti sebanyak 5.443 orang, Sertifikasi Kompetensi Dan Kelembagaan diikuti sebanyak 1.669 Orang dan Pengembangan Kompetensi Teknis dikuti sebanyak 5.999 Orang;

e. Penguatan kelembagaan dan program pelatihan melalui akreditasi kelembagaan dan program pelatihan, dengan perolehan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi dengan kategori Bintang 1 (satu). Program pelatihan terakreditasi mencakup akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Administrator dengan kategori "C", Program Pelatihan Dasar CPNS dengan kategori "B" dan Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dengan kategori "C";

f. Penyediaan dokumen AKPK (HCDP dan IDP), pengembangan kompetensi ASN diarahkan sesuai kebutuhan nyata organisasi dan tantangan pembangunan daerah;

g. Penyediaan sistem pembelajaran terintegrasi melalui Aplikasi Ruang Belajar Aparatur Kepri (LIGAT Kepri) dan Perluasan pengembangan kompetensi melalui *Coorporate University (CorPu)* seperti *Community Of Practice (COP);*

h. Penguatan jejaring organisasi dan kelembagaan dengan melakukan kerja sama dengan instansi diluar Pemerintah Provinsi Kepri dan Perguruan Tinggi, Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengembangan kompetensi sumber daya manusia dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengembangan kompetensi melalui jalur Magang dengan tagline "Melur Berseri" (Magang Pegawai Negeri Sipil Unggul Kepri Bersinergi Menuju Satu Data Terintegrasi) dengan BPS Provinsi Kepulauan Riau.

9. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN

   Indeks BerAkhlak: Upaya dalam peningkatan kepatuhan terhadap Merit Sistem dan Sistem Manajemen ASN diantaranya:

   a. Menginternalisasikan *Core Value* ASN "BerAKHLAK" dalam bentuk Webinar Berakhlak. Internalisasi budaya *Core Value* ASN "BerAKHLAK" melalui webinar merupakan salah satu upaya strategis untuk menanamkan nilai-nilai dasar ASN secara efektif dan merata kepada seluruh aparatur. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ASN terhadap makna serta implementasi nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari;

   b. Peningkatan peran Agen Perubahan sebagai pelopor perubahan pada Perangkat Daerah melalui penetapan Agen Perubahaan dan penyiapan rencana tindak Agen Perubahan;

   c. Untuk mengukur keberhasilan implementasi *Core Values* ASN dan *Employer Branding* "Bangga Melayani Bangsa" Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Survei Budaya Kerja BerAKHLAK dan Evaluasi Implementasi BerAKHLAK secara mandiri. Survei Budaya Kerja BerAKHLAK bertujuan untuk mengetahui tingkat penerapan budaya organisasi diantaranya implementasi *Core Values* BerAKHLAK, keselarasan antara nilai pribadi dan organisasi, sedangkan Evaluasi Implementasi BerAKHLAK bertujuan untuk mengevaluasi komitmen Perangkat Daerah dalam internalisasi BerAKHLAK.

10. Terwujudnya Pelayanan Publik secara Prima

    Indeks Kepuasan Masyarakat: Provinsi Kepulauan Riau secara berkelanjutan melakukan berbagai upaya dalam rangka mendukung ketercapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai salah satu tolok ukur kualitas pelayanan publik. Menyelenggarakan Asistensi Peningkatan Pelayanan Publik sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Semua Perangkat Daerah/ Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau aktif melaksanakan Survei dan menyampaikan laporan dengan nilai rata- rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 86,92 dengan Mutu Pelayanan "B" dan Kinerja Unit Pelayanan "Baik", sebagaimana tabel terlampir:

Tabel 7.3.27 Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

No	OPD/OPP	IKM	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan	Jumlah Responden	Periode Survei
1	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	84,10	B	Baik	50	Tahunan
2	Biro Kesejahteraan Rakyat	86,08	B	Baik	741	Tahunan
3	Biro Hukum	83,80	B	Baik	60	Tahunan
4	Biro Perekonomian dan Pembangunan	86,71	B	Baik	145	Tahunan
5	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	89,09	A	Sangat Baik	163	Tahunan
6	Biro Organisasi	83,92	B	Baik	91	Tahunan
7	Biro Umum	85,21	B	Baik	152	Tahunan

No	OPD/OPP	IKM	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan	Jumlah Responden	Periode Survei
8	Biro Administrasi Pimpinan	83,68	B	Baik	70	Tahunan
9	Sekretariat DPRD	79,50	B	Baik	129	Tahunan
10	Inspektorat Daerah	84,21	B	Baik	145	Tahunan
11	Dinas Pendidikan	85,90	B	Baik	200	Tahunan
12	Dinas Kesehatan	91,41	A	Sangat Baik	100	Tahunan
13	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	95,61	A	Sangat Baik	400	Semester 1
14	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	84,60	B	Baik	510	Semester 1
15	Dinas PUPR	92,22	A	Sangat Baik	10	Tahunan
16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	84,98	B	Baik	80	Tahunan
17	Dinas Sosial	88,04	B	Baik	114	Tahunan
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	88,80	A	Sangat Baik	50	Tahunan
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	82,67	B	Baik	222	Tahunan
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87,64	B	Baik	100	Tahunan
21	Dinas Perhubungan	82,56	B	Baik	399	Tahunan
22	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	84,25	B	Baik	70	Tahunan
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	82,75	B	Baik	240	Tahunan
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	89,26	A	Sangat Baik	53	Tahunan
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	82,58	B	Baik	277	Tahunan
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	86,93	B	Baik	156	Tahunan
27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	90,69	A	Sangat Baik	100	Tahunan
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	82,95	B	Baik	380	Tahunan
29	Dinas Kelautan dan Perikanan	87,23	B	Baik	375	Tahunan
30	Dinas Kebudayaan	85,58	B	Baik	333	Tahunan
31	Dinas Pariwisata	93,63	A	Sangat Baik	58	Tahunan

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau

Kecenderungan (trend) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2018 hingga 2025 di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, meskipun sedikit mengalami fluktuatif pada tahun 2022, sesuai grafik berikut:

Grafik 7.3.12 Trend Nilai IKM Pemprov Kepri 2018-2025



Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau

Indeks Pelayanan Publik: Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025 disebutkan bahwa Capaian Nilai Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah 4,48 Kategori A- (Sangat Baik).

Tabel 7.3.28 Tren Pencapaian Nilai IPP Prov Kepri 2020-2025

Tahun	Nilai IPP	Kategori	Predikat
2020	3,93	B	Baik
2021	4,21	A-	Sangat Baik
2022	4,34	A-	Sangat Baik
2023	4,13	A-	Sangat Baik
2024	4,26	A-	Sangat Baik
2025	4,48	A-	Sangat Baik

Sumber : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kepulauan Riau

Sebagaimana terlihat dari tren capaian nilai IPP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2020 s.d. 2025 Sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik Secara Prima menunjukkan terjadi peningkatan namun masih berfluktuasi dan belum mencapai predikat Pelayanan Prima. Upaya yang dilakukan dalam mendukung ketercapaian indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP):

a. Asistensi/ Sosialisasi PEKPPP Tahun 2025 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau;

b. Melaksanakan Pendampingan terhadap Unit Lokus Evaluasi PEKPPP Mandiri dalam rangka memberikan penjelasan mekanisme Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri.

Tingkat Kepatuhan Standara Pelayanan: Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bebas maladministrasi baik dari peningkatan kompetensi pelaksana, sistem perencanaan yang berprinsip pada transparansi dan akuntabel, pengelolaan pengaduan yang baik hingga kepatuhan terhadap produk pengawasan Ombudsman. Berdasarkan hasil penilaian Opini Ombudsman Tahun 2025 Provinsi

Kepulauan Riau meraih Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mendukung ketercapaian indikator Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik adalah Mengikuti Sosialisasi penilaian, Melakukan Pendampingan saat Penilaian. Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi, diantaranya adalah Secara umum pelaksanaan PEKPPP Mandiri pada tahun 2025 dapat dilaksanakan sebagaimana rencana awal. Namun demikian dalam pelaksanaannya ditemukan permasalahan dan kendala, yaitu:

a. Komitmen pimpinan disetiap OPD terhadap pelaksanaan PEKPPP masih bervariasi dan belum merata.
b. Pelaksanaan PEKPPP sering dianggap hanya sebagai kewajiban administratif, bukan bagian dari perbaikan kinerja.
c. Belum semua OPD memahami secara mendalam instrumen PEKPPP.
d. Ketersediaan data dan dokumen Pendukung tidak selalu mutakhir atau terdokumentasi dengan baik di setiap OPD.

E. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi RB General maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi, dengan cara sebagai berikut:

1. Dalam mendukung ketercapaian Indeks Perencanaan Pembangunan: Meningkatkan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan untuk mempercepat dan menjawab isu permasalahan di Daerah dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui perencanaan yang berbasis data dan riset.
2. Dalam Peningkatan Indeks SPBE, Perlu disusun Rencana Induk dan Arsitektur dan *Roadmap* SPBE.
3. Dalam penerapan Sistem Akuntabiltas, komitmen membangun *crosscutting* dan kolaborasi kinerja antar perangkat daerah agar sasaran dapat tercapai dengan maksimal dan Penerapan Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan melalui aplikasi e-SAKIP.
4. Peningkatan Indeks Reformasi Hukum, Optimalisasi SDM melalui peningkatan kompetensi dalam rangka tata kelola JDIH serta menjaga kepatuhan terhadap mekanisme penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan sesuai peraturan yang berlaku.
5. Peningkatan Indeks Kualitas kebijakan adalah melakukan evaluasi dengan tidak lanjut kongkret penglibatan aktif analis kebijakan dalam perumusan kebijakan dengan mengikuti tahapan-tahapan penyusunan kebijakan dalam pruduk hukum.
6. Peningkatan kinerja digitalisasi arsip diantaranya penyelesaian Kebijakan JIKN, melaksanakan alih media sesuai dengan target yang ditentukan, melaksanakan

bimbingan teknis pemberkasan arsip pada aplikasi Srikandi, melaksanakan pameran virtual

7. Upaya dalam peningkatan Indeks Tata Kelola pengadaan, harmonisasi kebijakan internal dengan regulasi pengadaan nasional, Peningkatan jumlah SDM pengadaan bersertifikat kompetensi, Optimalisasi e-Katalog, *e-Purchasing*, dan non-tender elektronik serta Meningkatkan indikator pengendalian dan mitigasi risiko.
8. Upaya Pencapaian Merit Sistem, Pengembangan Kompetensi berbasis 70:20:10. Mengoptimalkan: 70% pembelajaran di tempat kerja (penugasan khusus, *project based learning*). 20% *coaching* dan *mentoring* oleh atasan langsung. 10% pelatihan formal (diklat, bimbingan teknis, sertifikasi) dan Pengembangan Maturitas *CorPu.*
9. Peningkatan Indeks Berakhlak, mendorong setiap agen perubahan sebagai pelopor perubahan dengan menyusun dan melaksanakan rencana tindak.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi RB Tematik Penanganan Kemiskinan dan Peningkatan Investasi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif sebagai berikut:

1. Penajaman sasaran penerima manfaat melalui penguatan pemutakhiran dan integrasi data kemiskinan. Data kemiskinan akan diperbarui secara berkala dan disinkronkan dengan data nasional dan kabupaten/kota, sehingga intervensi program dapat lebih tepat sasaran, mengurangi potensi *exclusion error* dan *inclusion error*, serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program;
2. Penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, khususnya melalui peningkatan kualitas bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Bantuan tidak hanya difokuskan pada aspek permodalan, tetapi juga akan disertai dengan pendampingan usaha, peningkatan keterampilan, serta penguatan akses pasar, sehingga mampu meningkatkan keberlanjutan usaha dan pendapatan masyarakat secara jangka menengah dan panjang;
3. Mengoptimalkan kegiatan promosi investasi yang terarah dan berbasis potensi unggulan daerah. Promosi dilakukan melalui penyusunan dan pemutakhiran profil peluang investasi, partisipasi dalam forum investasi, serta penyebaran informasi investasi secara digital untuk menjangkau investor domestik maupun asing;
4. Penguatan kapasitas aparatur dilakukan melalui peningkatan kompetensi teknis pelayanan perizinan dan pemahaman regulasi investasi yang terus berkembang;
5. Memperkuat kualitas pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha sebagai fondasi utama peningkatan investasi, melalui optimalisasi pemanfaatan sistem perizinan berusaha berbasis risiko secara konsisten, peningkatan kecepatan dan kepastian proses perizinan, serta penguatan peran pelayanan terpadu satu pintu sebagai pusat layanan investasi yang responsif dan transparan;

6. Promosi investasi akan difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki nilai tambah tinggi dan berdampak luas terhadap perekonomian daerah, dengan memanfaatkan berbagai platform digital dan forum investasi strategis.

F. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

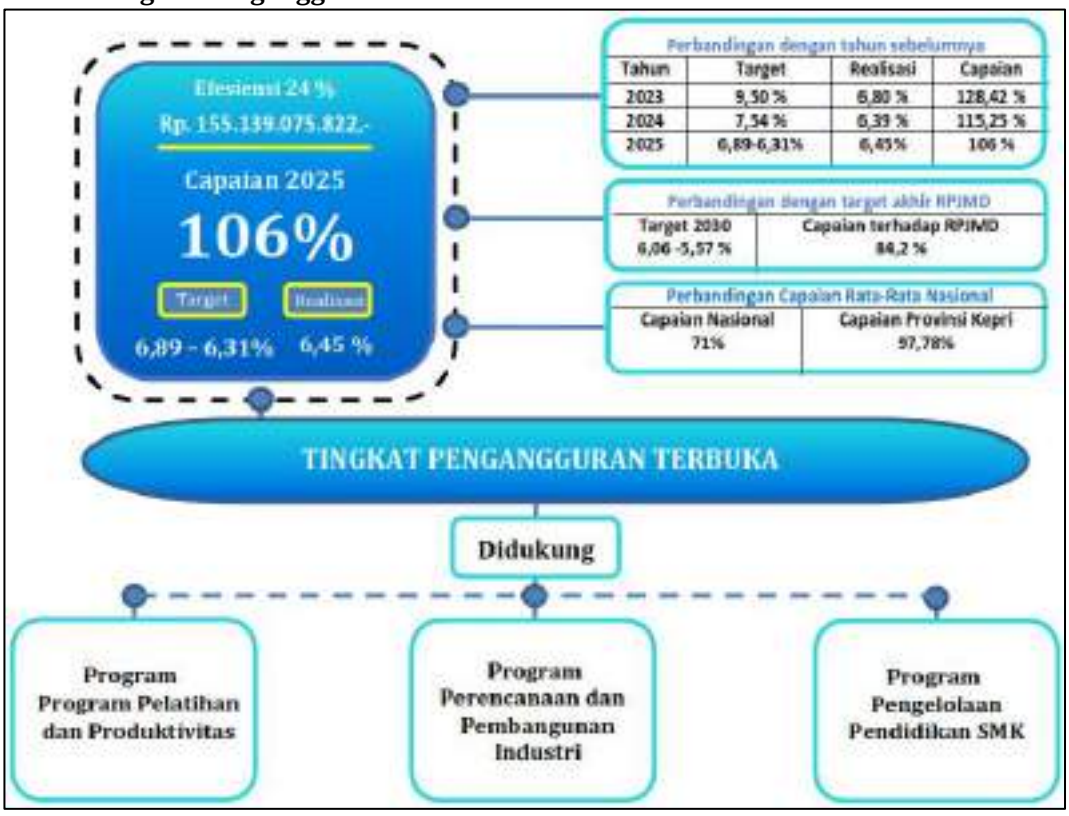
Tabel 7.3.29 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Penataan Organisasi	143.337.175,00	136.909.003,00	96
Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.038.635.971,00	2.547.091.975,00	83,82
Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.176.054.010,00	2.133.795.679,00	97,91
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	943.724.521,00	918.526.286,00	97,33
Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.036.940.080,00	2.953.325.194,00	97
Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.273.739.100,00	1.233.785.260,00	97
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.717.991.298,00	2.666.534.250,00	98
Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	506.091.009,00	470.886.286,00	92,95
Program Pengelolaan Arsip	7.583.100,00	6.948.410,00	91,6
Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	153.857.132,00	153.656.000,00	99,87
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	727.026.712.074,00	711.277.901.128,00	98
Program Kepegawaian Daerah	1.703.768.849,00	1.473.413.976,00	86,48
Program Pengembangan Kompetensi Teknis	1.209.069.827,00	631.155.989,00	52
Program Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	773.198.774,00	687.725.408,00	89
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3.757.605.625,00	3.530.534.795,00	93,96
Program Pemberdayaan Sosial	600.895.841,00	596.713.086,00	99,30
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	219.614.350,00	202.641.291,00	92,27
Program Promosi Penanaman Modal	348.266.180,00	343.536.124,00	98,64
Program Pelayanan Penanaman Modal	211.876.799,00	198.918.230,00	93,88
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	51.106.895,00	48.201.398,00	94,31
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	13.707.100,00	13.517.645,00	98,62
Total	**749.913.775.710,00**	**732.225.717.413,00**	**97,64**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp749.913.775.710,00 terealisasi sebesar Rp732.225.717.413,00 atau 97,64%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp17.688.058.297,00 (2,3%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi (105%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (97,64%) dengan efesiensi 7,36%.

7.3.5.3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang Berkompetensi dan Berdaya Saing

7.3.5.3.1. Tingkat Pengangguran Terbuka



Pengangguran Terbuka (TPT) atau yang sering dikenal sebagai angka pengangguran sering kali dijadikan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau menurun. Tingkat Pengangguran pada Tahun 2025 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 106% dari target sebesar 6,89 - 6,31% (menggunakan target tertinggi) dan terealisasi sebesar 6,45% .

Perlu kami sampaikan bahwa telah dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja, di mana indikator kinerja yang digunakan tetap sama namun mengalami penyesuaian pada penamaan serta target pencapaiannya. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan organisasi, serta peningkatan akurasi dalam pengukuran kinerja. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Pada Indikator ini perjanjian kinerja murni tahun 2025 menjanjikan pencapaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target 7,21, kemudian perjanjian kinerja mengalami perubahan dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target menjadi 6,89 – 6,31%.

Pada bagian ini, kami akan menyampaikan hasil analisis atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja terbaru sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi. Analisis ini mencakup

tingkat pencapaian setiap indikator, efektivitas pelaksanaan program, serta identifikasi faktor pendukung dan hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai keberhasilan maupun aspek yang masih perlu ditingkatkan, sehingga menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam mencapai target kinerja pada periode berikutnya.

Ketenagakerjaan adalah masalah hajat hidup orang banyak yang pada akhirnya menjadi cermin kemajuan pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan Komitmen yang kuat dari berbagai pihak agar permasalahan ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan usaha untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi titik sentral dari pembangunan secara keseluruhan. Selain itu juga diperlukan upaya Perencanaan, Monitoring, evaluasi dan dilanjutkan dengan pengkajian yang konsisten dan berkelanjutan sehingga provinsi dapat mencapai target dalam menurunkan angka pengangguran.

Tingkat Pengangguran terbuka dikenal sebagai angka pengangguran adalah Angka yang seringkali dijadikan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan, sehingga perkembangan TPT dari tahun ke tahun di suatu wilayah akan menjadi perhatian yang sangat serius dari pemerintah. Untuk mencapai sasaran Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran ditetapkan indikator kinerja yaitu angka pengangguran/ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdaya saing dilihat dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan yang cukup menggembirakan. Realisasi indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 6,45% dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 6,89 – 6,31% (dengan penggunaan angka tertinggi) sehingga capaian kinerja sebesar 106% atau dalam kategori “Sangat Baik”.

Tabel 7.3.30 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,89 – 6,31%	6,45%	106%

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Hasil analisis indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat diketahui bahwa dari target yang telah ditetapkan yaitu masuk di rentang 6,89-6,31% yang terealisasi sebesar 6,45% (penggunaan target tertinggi 6,89%) sehingga capaian kinerja adalah sebesar 106%.

Angkatan kerja yang merupakan bagian dari mempengaruhi nilai Tingkat Pengangguran terbuka adalah bagian dari penduduk usia kerja, sehingga jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2025 sebanyak 1.124.530, naik sebesar 3.870 orang dibanding Agustus 2024 sebesar 1.120.660 orang. Sejalan dengan penurunan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami Penurunan sebesar 0,9% poin dari 68,68% tahun 2023 menjadi 68,23 persen tahun 2025.

Pada Tahun 2025 Penduduk bekerja Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan menjadi sebanyak 1.051.980 dari 1.049.000 orang tahun 2024 dan pengangguran naik sebanyak 990 orang. Meskipun Jumlah Angkatan Kerja beserta komponennya secara absolut mengalami kenaikan, namun jumlah pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau justru menunjukan kenaikan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2025 sebesar 68,23% mengalami penurunan 0,94% poin dibanding Agustus 2024. Penurunan TPAK mengidikasikan bahwa terjadi Penurunan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja maupun sebagai penganggur. Dapat juga dikatakan telah terjadi perpindahan penduduk dari kategori Angkatan kerja ke kategori bukan Angkatan kerja (sekolah, Mengurus Rumah Tangga dan lainnya).

Tabel 7.3.31 Karakteristik Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin dan Daerah Tempat tinggal Agustus 2023—Agustus 2025

Karakteristik	Agustus 2023 (persen)	Februari 2024 (persen)	Agustus 2024 (persen)	Februari 2025 (persen)	Agustus 2025 (persen)	Perubahan Ags 24-Ags 25 (persen poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,80	6,94	6,39	6,89	6,45	0,06
TPT Menurut Jenis Kelamin						
- Laki-laki	5,95	7,17	6,02	6,40	6,40	0,38
- Perempuan	8,23	6,53	7,00	7,70	6,54	-0,46
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal						
- Perkotaan	6,77	7,06	6,74	6,99	6,70	-0,04
- Perdesaan	7,00	5,73	2,50	5,89	3,56	1,06

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Jika dilihat Berdasarkan tipe daerah/daerah tempat tinggal, TPT perkotaan Tahun 2023 sebesar 6,77 persen, TPT wilayah perkotaan Lebih rendah dibandingkan TPT di daerah Pedesaan yang sebesar 7,00. Berbeda dengan TPT perkotaan, Pada Tahun 2024 adanya perubahan TPT Menurut tempat tinggal dari tahun 2023 sebsar 0,04% poin, sampai dengan tahun 2025 TPT perkotaan menjadi 6,70 atau naik sebesar 0,04% poin dari tahun 2024 (6,74%). Ditahun 2025 di Pedesaan mengalami kenaikan angka yang cukup signifikan sebesar 1,06 persen poin, dari TPT pedesaan tahun 2024 sebesar 2,50 menjadi 3,56 pada Tahun 2025.

Pada Agustus 2025, TPT laki-laki sebesar 6,40 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 6,54%. Tahun 2025 TPT laki-laki mengalami Kenaikan dibandingkan TPT perempuan yaitu masing-masing sebesar 0,38 persen poin dan TPT Perempuan mengalami penurunan sebesar 0,46% poin, jika dibandingkan dengan Agustus 2024.

Grafik 7.3.13 Distribusi Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut tingkat Pendidikan Tahun 2023-2025



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pada Agustus 2023 mempunyai pola sama Sampai dengan Agustus 2025. Pada Agustus 2024, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah menengah kejuruan masih yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya. Sementara TPT yang paling rendah adalah pada tamatan pendidikan diploma, yaitu sebesar 3,69%. Dibandingkan Agustus 2024, Penurunan jumlah TPT terjadi pada kategori tamatan pendidikan kecuali SMK/SMA. Penurunan TPT terbesar pada kategori tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP/sederajat) yaitu sebesar 26,24% poin dan juga kategori Perguruan tinggi yaitu sebesar 13,08 persen mengalami kenaikan sebesar 1,03%. Tamatan Sekolah menengah Kejuruan Pada Tahun 2025 menurun secara signifikan dari 0,87 persen pada tahun 2024 menjadi 72,23% pada Agustus tahun 2025 atau naik sebesar 12,42%.

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Capaian kinerja Tingkat Pengguran Terbuka tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 17,47 poin (Capaian tahun 2024 sebesar 115,25%). Hal ini disebabkan dari tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka 6,39% meningkat menjadi 6,45% pada tahun 2025. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.3.32 Tren Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

INDIKATOR	TARGET						REALISASI					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Pengangguran Terbuka	10,34	10,22	10,1	9,50%	7,54%	6,31%	10,34	9,91	8,23	6,80	6,39	6,45

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Adapun evaluasi tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau mulai Tahun 2015- 2025 adalah sebagai berikut:

Grafik 7.3.14 Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015-2025



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Dari periode tahun 2016 ke 2025, mengalami Penurunan angka pengangguran yang cukup signifikan sebesar 1,3 poin persen, dari tahun 2020 ke 2022 terjadi penurunan sebesar 2,11 poin persen, dari tahun 2021 sampai 2022 TPT Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan sebesar 1,68 poin. Pada tahun 2018 tercatat TPT Provinsi Kepulauan Riau sebesar 7,12 persen. Dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,21. Pengaruh Covid-19 menyebabkan angka TPT dari Tahun 2020 terus mengalami penurunan yang cukup signifikan, seiring dengan peningkatan perekonomian sampai tahun TPT tahun 2024 sampai diangka 6.39 atau turun 1,84% poin dibandingkan tahun 2022. Tingkat pengangguran Provinsi Kepulauan Riau pada Agustus Tahun 2025 kembali naik sebesar 0,06% poin dibanding TPT tahun 2024.

Adapun Evaluasi tingkat pengangguran terbuka pada setiap Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2025 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.3.33 Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Kepri Tahun 2023-2025

Karakteristik Pendudukan Bekerja	Agustus 2023	Agustus 2024	Agustus 2025	Perubahan Ags 2023–Ags 2025	Perubahan Ags 2024–Ags 2025
	persen (%)	persen (%)	persen (%)	persen poin	persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Karimun	6,02	5,52	6,31	0,29	0,79
Kabupaten Bintan	5,43	4,53	4,81	-0,62	0,28
Kabupaten Natuna	4,05	3,89	3,98	-0,07	0,09
Kabupaten Lingga	3,52	3,38	3,52	0,00	0,14
Kabupaten Kepulauan Anambas	2,55	2,38	2,56	0,01	0,18
Kota Batam	8,34	7,68	7,57	-0,57	-0,11
Kota Tanjungpinang	4,76	4,69	4,72	-0,04	0,03
Kepulauan Riau	**6,80**	**6,39**	**6,45**	**-0,35**	**0,06**

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa TPT tertinggi pada Tahun 2025 terjadi di Kota Batam sebesar 7,68% dan yang paling rendah adalah Kabupaten Anambas sebesar 2,38%. Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan komposisi per kabupaten/Kota Berbagai kebijakan pemerintah dan usaha terkait penciptaan lapangan kerja masih tetap memerlukan perhatian. Secara absolut Pada Tahun 2024 angka TPT Kota

Batam menurun sebesar 0,46 persen poin dari Agustus 2023 (8,14%) menjadi 7,68%. Tahun 2025 kembali mengalami Penurunan sebesaar 0,11 persen poin dari tahun 2024 dengan TPT sebesar 7,57 poin. Hal ini menunjukkan adanya penurunan jumlah pengangguran di Kota Batam. Tingkat pengangguran terbuka paling tinggi masih didominasi Kota Batam sebesar 7,57 dan yang paling rendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yakni 2,56%. Secara keseluruhan tergambar terjadi kenaikan TPT di kerseluruhan kabapten/kota. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka justru pada Kota Batam. TPT Kota batam pada tahun 2024 sebesar 7,68% menjadi menjadi 7,57%.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,45% dengan target sebesar 6,06 - 5,57% (penggunaan angka terendah) sehingga capaian kinerja sebesar 84,2%.

Tabel 7.3.34 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2025	Target akhir RPJMD (2026)	Capaian (%)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,45	6,06 -5,57	84,2

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025 secara nasional sebesar 4,85 persen turun sebesar 0,05 persen poin dibanding Agustus 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025 sebesar 6,45 persen, naik sebesar 0,06 persen poin dibanding Agustus 2024. Perbandingan dengan TPT Provinsi Kepulauan Riau berada di atas TPT Nasional sebesar 1,6 poin. Perbandingan TPT Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 dengan TPT Nasional dan TPT Provinsi Lain di Indonesia Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.3.35 TPT Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan TPT se-Indonesia Tahun 2025

NO	PROVINSI	TPT	
		TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	ACEH	5,75	5,64
2	SUMATERA UTARA	5,66	5,32
3	SUMATERA BARAT	5,75	5,62
4	RIAU	3,70	4,16
5	JAMBI	4,48	4,26
6	SUMATERA SELATAN	3,86	3,69
7	BENGKULU	3,11	3,41
8	LAMPUNG	4,19	4,21
9	KEP. BANGKA BELITUNG	4,63	4,45
10	**KEP. RIAU**	**6,39**	**6,45**

NO	PROVINSI	TPT	
		TAHUN 2024	TAHUN 2025
Dst.	....		
38	PAPUA PEGUNUNGAN	1,32	1,68
	INDONESIA	**4,91**	**4,84**

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Target nasional TPT pada tahun 2025 adalah sebesar 4,45 - 5% dengan realisasi TPT nasional sebesar 4,84%. Jika dibandingkan dengan realisasi TPT Provinsi Kepri Agustus 2025 dengan target TPT nasional maka ketercapaian kinerja sebesar 71%.

E. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang mempengaruhi Kenaikan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 dipengaruhi yaitu:

1. Adanya 6 (enam) lapangan usaha mengalami penurunan tenaga kerja, dengan penurunan terbesar pada Konstruksi (penurunan sebanyak 6720 orang), Jasa Pendidikan (penurunan sebanyak 6010 orang), Jasa Kesehatan dan kegiatan social (pengurangan sebanyak 3940 ribu orang, *Gas e-Treatmen air*, sampah dan daur ulang (penurunan sebanyak 2370 orang) serta transportasi dan perdagangan (pengurangan sebanyak 1030 orang) dan jasa lainnya (penurunan 1020 orang).

2. Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2025 didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Atas Umum sebanyak 343,180 orang (32,64 persen) dan sekolah Menengah kejuruan sebesar 189.660 (18,03 persen). Kemudian tamatan Sekolah Dasar sebanyak 193.090 orang (18,36 persen). Dalam satu tahun terakhir, Penduduk yang bekerja sebanyak 1.051.980 orang, mengalami penurunan penyerapan di penduduk bekerja berpendidikan sekolah menengah kejuruan.

Tabel 7.3.36 Karakteristik Penduduk Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023 – 2025

Karakteristik Penduduk Bekerja	Agustus 2023		Februari 2024		Agustus 2024		Februari 2025		Agustus 2025	
	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan										
SD ke Bawah	218,55	21,44	205,82	20,51	186,88	17,81	187,69	18,46	193,09	18,36
Sekolah Menengah Pertama	123,04	12,07	89,43	8,91	119,16	11,36	120,95	11,90	132,99	12,64
Sekolah Menengah Atas	324,47	31,83	313,13	31,21	318,17	30,33	297,18	29,23	343,18	32,62
Sekolah Menengah Kejuruan	184,18	18,07	190,80	19,02	216,69	20,66	184,96	18,20	189,66	18,03
Perguruan Tinggi[1]	169,12	16,59	204,22	20,35	208,18	19,84	225,77	22,21	193,06	18,35
Jumlah	**1.019,36**	**100,00**	**1.003,39**	**100,00**	**1.049,09**	**100,00**	**1.016,54**	**100,00**	**1.051,98**	**100,00**

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

3. Indikator lain yang lebih mendalam menyangkut angkatan kerja adalah pekerja penuh dan pekerja tidak penuh. Indikator ini mampu menjelaskan bahwa seseorang yang bekerja ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi, hal ini diindikasikan dari jam kerja rendah. Pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua

kelompok yaitu pekerja setengah penganggur dan pekerja paruh waktu. Penduduk yang dianggap sebagai pekerja penuh waktu (*full time worker*), yaitu penduduk yang bekerja pada kelompok 35 jam ke atas per minggu. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh dengan persentase sebesar 80,29 persen pada Agustus 2025. Sementara itu, 19,71 persen sisanya merupakan pekerja tidak penuh. Pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu setengah pengangguran (5,01persen) dan pekerja paruh waktu (14,70 persen). Dibandingkan Agustus 2024, persentase pekerja penuh mengalami penurunan sebesar 1,98 persen poin, dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 7.3.37 Karakteristik Penduduk Bekerja Berdasarkan Pekerjaan Penuh/Tidak Penuh Tahun 2024-2025

No	Karakteristik	2024 (org)	2025 (org)	Perubahan 2024-2025	Persen
1	Pekerja Penuh > 35 Jam	863.130	816,55	-46,58	80,33
2	Pekerja Tidak Penuh (1-34 Jam)	185.950	199,99	-14.040	19,67

Sumber : Bursa Resmi Statistik 2025

Untuk mengatasi TPT Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya-upaya yang mendukung keberhasilan penurunan tingkat pengangguran terbuka adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan Program pelatihan dalam rangka Mengoptimalkan kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan melalui Pemetaan Kebutuhan Pelatihan, Perluasan Balai Latihan Kerja Melalui satuan Pelayanan, Pelaksanaan Pelatihan dengan berbagai Metode seperti Pelatihan di Balai Latihan Kerja, Pelathan di LPK Swasta dan Pelatihan Industri/pemagangan. Akselerasi Program Pemagangan Berbasis Kualifikasi Pendidikan.
2. Pemagangan Jenjang Sarjana (S1): Menjalin sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) untuk memfasilitasi lulusan perguruan tinggi masuk ke pasar kerja profesional melalui program pemagangan nasional.
3. Penguatan Program Pelatihan melalui aktivitas Pemagangan Jenjang Menengah (SMA/SMK): Fokus pada sektor pariwisata dan ritel untuk menyerap lulusan sekolah vokasi. Pelaksanaan pemagangan ini bekerja sama dengan mitra strategis, antara lain: Hotel Santika, PT. Bintan Resort Cakrawala (BRC) serta Department Store Ramayana.
4. Formalisasi Komitmen "*Link and Match*" Lintas Sektor dengan Melakukan pengikatan kerja sama melalui Penandatanganan Komitmen Dukungan Program Pelatihan Vokasi dan Pemagangan di Provinsi Kepulauan Riau. Skala Kegiatan: Kegiatan ini melibatkan 84 pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terdiri dari perwakilan sektor industri, pendidikan vokasi (SMK & Politeknik), instansi pemerintah, dan asosiasi perhotelan yang tersebar di Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Mitra Industri Strategis: Komitmen ini didukung oleh perusahaan-perusahaan multinasional (MNC) dan industri besar, di antaranya: Sektor Manufaktur, Elektronik & Migas: PT. Citra Tubindo Tbk, PT. Sumitomo

Wiring Systems Batam, PT. McDermott Indonesia, PT. Infineon Technologies Batam, PT. Schneider Electric, dan PT. BSSTEC. Sektor Pendidikan: Politeknik Negeri Batam (Polibatam) yang melibatkan unsur pengajar, laboran, dan mahasiswa. Sektor Perhotelan & Pariwisata: Aston Inn Gideon Batam, Aston Batam Hotel & Residence, Grand Mercure, PT. Hotel Ozon (Artotel Group), dan Harper Premier Nagoya.

5. Upaya Penempatan Pasca Pelatihan, Penguatan Kelembagaan Bursa Kerja khusus di SMK serta Sinergi *Stakeholder* melalui Tim koordinasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
6. Peningkatan Pelayanan ketenagakerjaan melalui mengoptimalkan pelayanan penggunaan aplikasi SIAP kerja yang dapat digunakan dalam layanan pendataran pelatihan di Lembaga pelatihan kerja BLK dan LPK Swasta, Pendaftaran pemagangan ke luar negeri, sertifikasi BNSP, pendaftaran pencari kerja di karirhub atau portal Pemda dan Portal Swasta dan layanan ketenagakerjaan lainnya seperti *job fair*.
7. Melakukan kerja sama dengan perusahaan atas kebutuhan komposisi kompetensi yang dibutuhkan perusahaan, sehingga pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan melalui program pemagangan.
8. Kolaborasi bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pengembangan program Pendidikan vokasi dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjustifikasi sebaran wilayah industri dan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

F. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka penurunan tingkat pengangguran terbuka dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya, yaitu:

1. Peningkatan Koordinasi melalui Penguatan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) yang melibatkan Bappeda, disnaker, Dinas Pendidikan, disperindag, Lembaga Pendidikan vokasi, Konsersium Politeknik, Kadin, Asosiasi Perusahaan dan LSP serta meningkatkan kerja sama dengan industri dan dunia usaha (DUDI) agar pelatihan yang diberikan lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Melakukan pelatihan berbasis kompetensi yang lebih sinkron dengan perkembangan industri
2. Penyusunan Strategi daerah untuk revitalisasi Pelatihan Vokasi yang fokus pada Optimalisasi Sistem Informasi Pasar kerja, Penguatan Peran DUDI dalam Proses Pendidikan Vokasi, Penguatan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebutuhan Pasar Kerja, Meningkatkan relevansi dan aksesbilitas sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Terwujudnya kolaborasi rise inovasi dan Hilirisasi produk oleh akademisi, industri masyarakat dan Pemerintah daerah serta Monitoring dan Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Pelatihan Vokasi.

3. Pelatihan industri dalam bentuk Pemagangan dalam bentuk penempatan tenaga kerja, sehingga aktifitas pemagangan di industri masih tetap akan dilaksanakan pada tahun 2026.
4. Memperkuat dan memperluas kemitraan magang siswa pada Dunia Usaha untuk memberi ruang yang lebih fleksibel bagi peserta didik SMK melakukan magang pada dunia usaha sesuai dengan jurusan.
5. Menyesuaikan dan menyelaraskan kurikulum Pendidikan dan standar kelulusan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
6. Meningkatkan kemampuan lulusan peserta didik dengan penguasaan teknologi dan penguasaan Bahasa asing sebagai kemampuan dasar dalam memasuki pasar kerja.

G. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

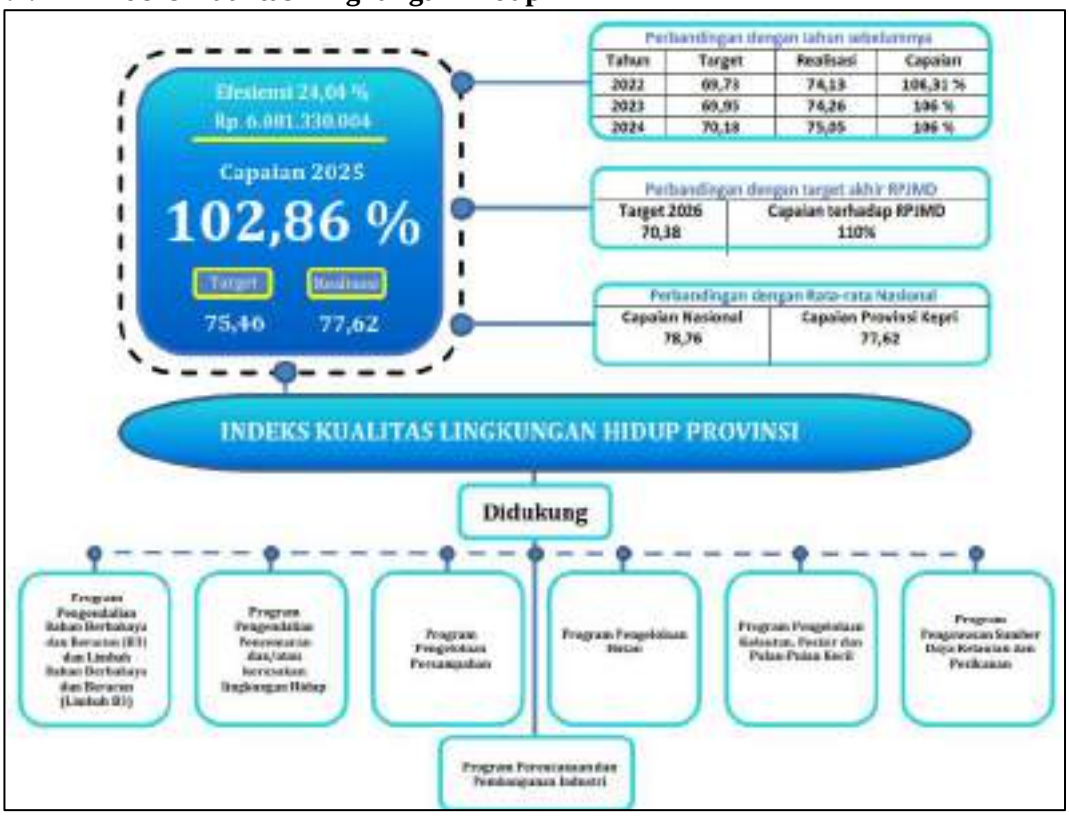
Tabel 7.3.38 Anggaran yang mendukung penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	6.023.866.700,00	5.867.448.582,00	97,40
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.400.000.000,00	689.397.940,00	49,24
Pengelolaan Pendidikan SMK	147.715.209.122,00	121.360.921.447,00	82,16
Total	**155.139.075.822,00**	**127.917.767.969,00**	**82,45**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp155.139.075.822,00 terealisasi sebesar Rp127.917.767.969,00 atau 82,45%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp27.221.307.853,00 (17,55%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Tingkat Pembangunan Terbuka (106%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (82,45%) dengan efesiensi 24%.

7.3.5.4. Sasaran Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup

7.3.5.4.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks IKLH di Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Realisasi indeks IKLH pada Tahun 2025 sudah baik sebesar 77,62 Indeks dari target sebesar 75,46 Indeks dengan capaian kinerja sebesar 102,86%.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH Nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup di seluruh Provinsi. IKLH Provinsi Kepulauan Riau merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota.

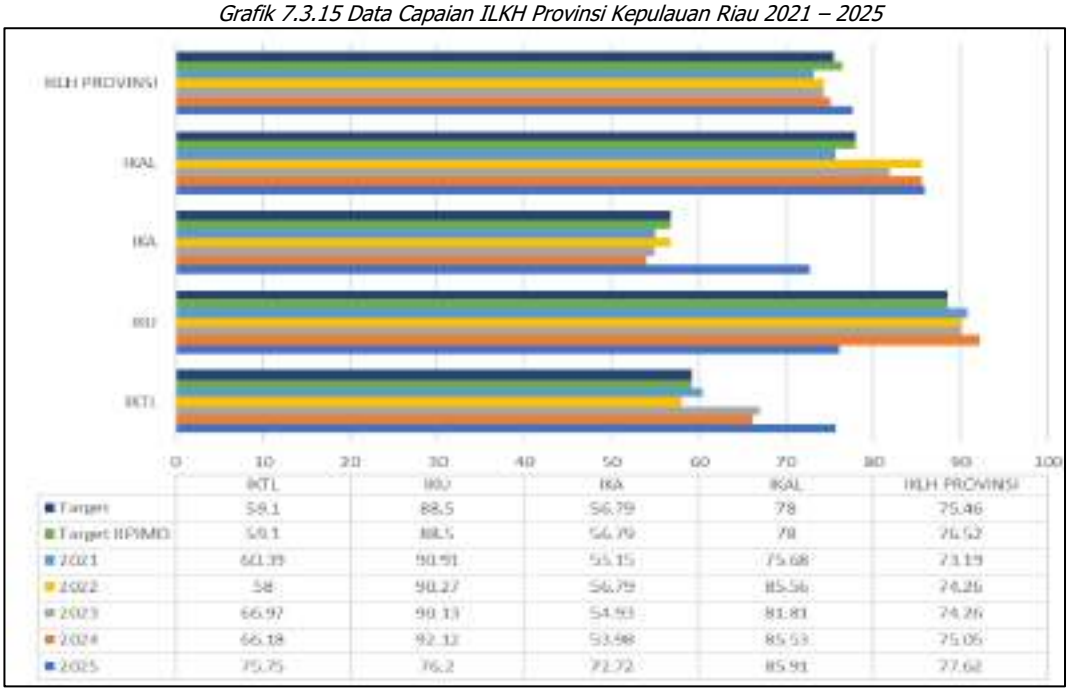
Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu:

1. Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter :
    - TSS

- Total Fosfat
- DO
- Fecal Coli
- pH
- NO3
- BOD
- COD

2. Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2.
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung;
4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat.

Grafik 7.3.15 Data Capaian ILKH Provinsi Kepulauan Riau 2021 – 2025



	IKTL	IKU	IKA	IKAL	ILH PROVINSI
Target	59.1	88.5	56.79	78	75.46
Target RPJMD	59.1	88.5	56.79	78	76.52
2021	60.39	90.91	55.15	75.68	73.19
2022	58	90.27	56.79	85.56	74.26
2023	66.97	90.13	54.93	81.81	74.26
2024	66.18	92.12	53.98	85.53	75.05
2025	75.75	76.2	72.72	85.91	77.62

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penurunan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup dilihat dari indikator kualitas lingkungan hidup Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Realisasi indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 77,62 indeks dengan target indikator yang telah

ditetapkan sebesar 75,46 indeks sehingga capaian kinerja sebesar 102,86% atau dalam kategori “Sangat Baik.”

Tabel 7.3.39 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,46 Indeks	77,62 Indeks	102%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 77,72 dengan rating Sedang; Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan yang terjadi pada musim kemarau yang membuat volume air sungai berkurang di Kab/Kota, terjadi pencemaran air akibat pengerukan atau pemotongan tebing tanah atau pembukaan lahan untuk pelebaran jalan dan influent lain melalui selokan-selokan air yang ada di sekitar waduk di Batam, terbatasnya ketersediaan anggaran untuk melakukan pemantauan kualitas air. Oleh karena itu Indeks Kualitas Air (IKA) capaiannya belum masuk kategori Baik.

Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 76,20 dengan rating Sedang; Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan di banding tahun 2024, hasil evaluasi dari 7 kab/kota dimana berdasarkan evaluasi tersebut indeks respon daerah menurun jika dibanding pada Program Langit Biru pada umumnya kab/kota tersebut memiliki kebijakan dan peraturan, SDM, serta implementasi berupa menyiapkan sarana prasarana seperti pedestrian, jalur sepeda, Ruang Terbuka Hijau (RTH), penerapan area rendah emisi (LEZ); melaksanakan program seperti *Car Free Day* (CFD) dan gerakan masyarakat (germas) bersepeda tetapi pembukaan lahan untuk kawasan industry semakin banyak karena banyaknya investasi yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, target dan capaian pada IKU. Keberhasilan pemantauan udara di provinsi Kepulauan Riau tidak lepas dari adanya instrumen AQMS yang difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di letakkan di 2 (dua) lokasi yaitu Kota batam dan Kota Tanjungpinang. *Air Quality Monitoring System* (AQMS) adalah Alat Pemantau Kualitas Udara Otomatis adalah sistem untuk mengetahui tingkat pencemaran udara.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 75,75 dengan rating Sedang; pada data Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), terdapat 7 kab/kota yang meningkat nilai IKTL disbanding tahun 2024 yaitu 66,18. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan luas ruang terbuka hijau di Provinsi Kepulauan Riau. Seperti di Pemukiman dan Taman Kota, baik dalam bentuk taman lingkungan maupun penghijauan pekarangan. Ruang terbuka hijau permukiman yang dikelola dengan baik akan memberikan sumbangan yang berarti pada luasan ruang terbuka hijau kota seluruhnya. Penghijauan lingkungan yang dilakukan pada lahan-lahan terbuka atau lahan kritis.

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 85,91 dengan rating Baik. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) mengalami kenaikan karena dari 7 Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi, yang meningkat mutunya. Peningkatan kualitas air laut tentu tak terlepas dari adanya implementasi kebijakan seperti rehabilitasi dan restorasi pesisir seperti penanaman mangrove, partisipasi masyarakat dalam pengolahan pesisir dan laut dan tentu perbaikan di

hulu, hal ini terlihat naiknya IKA dan IKTL. Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas air laut dipengaruhi 80% oleh pencemaraan dan kerusakan di darat (*landbase pollution*).

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Grafik 7.3.16 Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Capaian kinerja kenaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar (2,57 poin) atau (3,42%). Dimana pada tahun 2024 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,05 indeks meningkat menjadi 77,62 indeks pada tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa upaya Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup telah menunjukkan hasil yang sangat positif.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah telah berhasil melaksanakan kegiatan-kegiatan yang efektif dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, seperti:

1. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
2. Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah;
3. Peningkatan konservasi, rehabilitasi dan penghijauan lingkungan.

Dengan demikian, Perangkat Daerah telah berhasil mencapai target IKLH tahun 2025 dan bahkan melampauinya. Ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2026 realisasi kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 77,62 indeks dengan target sebesar 70,38 indeks sehingga capaian kinerja sebesar 110%.

Tabel 7.3.40 Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun yang dinilai dengan Target akhir RPJMD

Target Akhir RPJMD	Realisasi IKLH	Capaian Kinerja
70,38 Indeks	77,62 Indeks	110%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel di atas realisasi IKLH Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 melebihi target RPJMD dengan capaian kinerja 110%.

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Posisi Provinsi Kepulauan Riau dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di level nasional, dapat terlihat dalam grafik berikut:

Tabel 7.3.41 Raport Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2025

Indeks	Target			Realisasi			Kriteria
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
IKA	55,4	55,5	55,6	54,59	54,78	72,97	Sedang
IKU	84,4	84,5	84,6	88,67	90,13	82,63	Sedang
IKL	64,5	65,5	66,5	61,79	61,95	78,19	Sedang
IKAL	60	60,5	61	78,84	81,67	82,69	Sedang
IKLH	**69,48**	**69,74**	**70**	**72,54**	**73,53**	**78,76**	**Sedang**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 7.3.42 Perbandingan Raport Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional dengan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Indeks	Target		Realisasi			
	Nasional 2025	Daerah 2025	Nasional 2025	Kriteria	Daerah 2025	Kriteria
IKA	55,6	54,45	72,97	Sedang	72,72	Sedang
IKU	84,6	92,65	82,63	Sedang	76,2	Sedang
IKL	66,5	66,18	78,19	Sedang	75,75	Sedang
IKAL	61	85,75	82,69	Sedang	85,91	Sedang
IKLH	**70**	**75,46**	**78,76**	**Sedang**	**77,62**	**Sedang**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Dari tabel tersebut diatas, bahwa IKLH Nasional tahun 2025 sebesar 78,76 poin, sedangkan capaian IKLH Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 77,62 poin, hal-hal yang menyebabkan menurunnya IKLH Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

1. Indeks Kualitas Udara (IKU) Daerah tahun 2025 sebesar 76,20 poin, menurun 6,43 poin dibandingkan Indeks Kualitas Udara (IKU) Nasional tahun 2025 sebesar 82,63 poin. Jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udaranya sebanyak 7 kabupaten/kota dengan menggunakan metode *Passive Sampler* dan sedangkan hanya dua Kota saja yang menggunakan metode AQMS ada dua Kota yaitu Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.
2. Indeks Kualitas Air (IKA) Daerah tahun 2025 sebesar 72,72 poin menurun 0,25 poin dibandingkan hasil Indeks Kualitas Air (IKA) Nasional tahun 2025 sebesar 72,97 poin. Jumlah pelaksanaan pemantauan IKA dilaksanakan oleh 7 Kabupaten Kota, yang dilaksanakan oleh Petugas PIC DLH Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) Daerah tahun 2025 sebesar 75,75 poin menurun 2,44 poin dibandingkan hasil Indeks Kualitas Lahan (IKL) Nasional tahun 2025 sebesar 78,19 poin. Penghitungan nilai IKL dikembangkan dari penghitungan IKTL

dengan mempertimbangkan dampak dari kanal dan kebakaran di lahan gambut. Hal ini adanya pengendalian dan pembatasan kerusakan Kawasan hutan di tujuh Kabupaten/Kota, pemulihan lahan yang dilakukan seluas 468,5 Ha yang terdapat di 12 lokasi.

4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Daerah tahun 2025 sebesar 85,91 meningkat 3,22 poin dibandingkan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Nasional tahun 2025 sebear 82,69 poin. Pemantauan kualitas air laut dilaksanakan oleh pusat.

E. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada Tahun 2024 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau sebesar 75,05 dari target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 70,18 dengan Rating Baik dengan Indeks Respon sebesar 5,10. Sehingga IKLH Provinsi Kepulauan Riau masuk peringkat ke 19 dari 38 Provinsi di Indonesia.

1. Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2025 sebesar 76,2 poin, menurun 15,92 poin dibandingkan dengan hasil perhitungan tahun 2045 sebesar 92,12 poin. Jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udaranya sebanyak 7 kabupaten/kota dengan menggunakan metode *Passive Sampler* dan hanya dua Kota yang menggunakan metode AQMS ada dua Kota yaitu Kota Batam dan Kota Tanjungpinang;
2. Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2025 sebesar 72,72 poin meningkat 18,74 poin dibandingkan hasil perhitungan tahun 2024 sebesar 53,98 poin. Jumlah pelaksanaan pemantauan IKA dilaksanakan oleh 7 Kabupaten Kota, yang dilaksanakan oleh Petugas PIC DLH Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 7.3.43 Pemantauan Indeks Kualitas Air

No	Kabupaten/ Kota	JUMLAH TITIK				NILAI INDEKS PER MUTU				IKA	IKA INA	IKA INA MUTU
		Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat			
1	**Kabupaten Karimun**	1	8	0	0	7,78	44,44	0,00	0,00	52,22	72,56	Sedang
2	**Kabupaten Bintan**	82	25	0	0	53,64	11,68	0,00	0,00	65,33	82,93	Sedang
3	**Kabupaten Natuna**	14	5	0	0	51,58	13,16	0,00	0,00	64,74	81,53	Sedang
4	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	0	6	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	73,56	Sedang
5	**Kabupaten Lingga**	6	6	0	0	35,00	25,00	0,00	0,00	60,00	81,83	Sedang
6	**Kota Tanjungpinang**	7	23	0	0	16,33	38,33	0,00	0,00	54,67	73,78	Sedang
7	**Kota Batam**	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SANGAT KURANG

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2025 sebesar 75,75 poin meningkat 9,57 poin dibandingkan hasil perhitungan tahun 2024 sebesar 66,18 poin. Hal ini adanya pengendalian dan pembatasan kerusakan Kawasan hutan di tujuh Kabupaten/Kota, pemulihan lahan yang dilakukan seluas 472,5 Ha yang terdapat di 13 lokasi seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.3.44 Pelaksanaan Rehabilitasi lahan Tahun 2025

No.	Lokasi	Instansi Pelaksana	Luas (Ha)
1	Kecamatan Gunung Kijang	DLHK Prov. Kepri	1,25
2	Kel. Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur	DLHK Prov. Kepri	1,25
3	Tanjung Tilli Kecamatan Bintan Timur	DLHK Prov. Kepri	10
4	Kecamatan Sagulung-Batam	DLHK Prov. Kepri	1
5	Tembeling Tanjung-Bintan	DLHK Prov. Kepri	1
6	Setokok-Batam	DLHK Prov. Kepri	3
7	HL Duriangkang Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, Batam	Direktorat Pengelolaan Air Minum Badan Usaha SPAM, Fasilitas, dan Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)	10
8	HL Tembesi Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Batam	Gapoktan Maju Bareng	180
9	HL Dangas Kelurahan Tanjung pinggir, Kecamatan Sekupang, Batam	KTH Dangas Hijau Makmur	30
10	HL Sei Hulu Galang Kelurahan Karas, Kecamatan Galang, Batam	Kelompok Tani Hutan Barelang Jaya, Kelompok Tani Hutan Jaya Tani	200
11	HL Sei Pulai, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Bintan	Kelompok Tani RHL Bintan Tani Bertuah	15
12	HP Gunung Demit, Desa Topaya Utara, Kecamatan Toapaya, Bntan	Kelompok Tani Bayu Asih	10
13	HP Gunung Demit, Desa Topaya Utara, Kecamatan Toapaya, Bntan	Kelompok Tani Lome Hijau	10
JUMLAH			**472,5**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) tahun 2025 sebesar 85,91 poin meningkat 0,38 poin dibandingkan hasil perhitungan tahun 2024 sebesar 85,53 poin, Pengambilan sampel untuk Indeks Kualitas Air Laut dilakukan pusat, Adapun kegiatan daerah antara lain penanaman mangrove di pesisir, pemantauan dan pengawasan Perusahaan pengelola limbah B3.

Untuk meningkatkan IKLH Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya-upaya yang mendukung keberhasilan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Air
   a. Pengendalian pencemaran air limbah industri dan domestik melalui penegakan regulasi, inspeksi berkala, dan sanksi yang tegas.
   b. Pembangunan dan peningkatan kapasitas IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) baik komunal maupun kawasan industri.
   c. Rehabilitasi sungai, danau, dan daerah aliran sungai (DAS) melalui penanaman vegetasi penyangga dan pengerukan sedimen.
   d. Gerakan pengurangan sampah plastik dan penguatan program bank sampah untuk menekan limbah ke badan air.
   e. Pemantauan kualitas air secara rutin dan *real-time* untuk deteksi dini pencemaran.

2. Pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil
    a. Penanganan dan penyelesaian kasus *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di wilayah perairan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya pada wilayah perbatasan dan perairan strategis.
    b. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.
    c. Penguatan dan pengembangan kapasitas Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) kelautan dan perikanan yang aktif, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Riau sebagai mitra pengawasan partisipatif.
3. Meningkatkan Kualitas Udara
    a. Pengendalian emisi industri melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan, *scrubber*, dan standar baku mutu emisi.
    b. Pembatasan kendaraan bermotor tinggi emisi, misalnya uji emisi wajib, pembatasan kendaraan tua, dan manajemen lalu lintas.
    c. Pengembangan transportasi publik massal dan transportasi rendah karbon (EV, sepeda, jalur pedestrian).
    d. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan patroli, pemantauan *hotspot*, dan pemberdayaan masyarakat.
    e. Penambahan ruang terbuka hijau (RTH) yang membantu penyerapan karbon dan meningkatkan kualitas udara perkotaan.
4. Meningkatkan Tutupan Lahan / Vegetasi
    a. Habilitasi hutan dan lahan kritis melalui reboisasi, penghijauan, dan penguatan kawasan lindung.
    b. Penegakan hukum terhadap perambahan hutan dan konversi lahan ilegal.
    c. Pengembangan perhutanan sosial untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lahan berkelanjutan.
    d. Pengendalian alih fungsi lahan melalui tata ruang yang disiplin dan pengawasan ketat.
    e. Restorasi ekosistem gambut dan mangrove yang berfungsi penting sebagai penyerap karbon.
5. Penguatan Kebijakan, Pengawasan, dan Kelembagaan
    a. Integrasi kebijakan lingkungan dengan rencana pembangunan daerah (RPJMD/RKPD).
    b. Peningkatan kapasitas SDM lingkungan dalam pemantauan, analisis, dan penegakan hukum.

6. Melaksanakan fungsi pembinaan ke kawasan industri guna memastikan hal-hal sebagai berikut:
    a. Pengendalian dampak lingkungan sektor industri.
    b. Pembinaan industri hijau dan berkelanjutan.
    c. Pengaturan dan pengawasan perdagangan barang berbahaya.
    d. Sinkronisasi kebijakan lingkungan dan ekonomi.

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Penurunan kualitas air laut sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas air laut dipengaruhi 80% oleh pencemaran dan kerusakan di darat diantaranya disebabkan oleh:
    a. Pembuangan sampah di laut
    b. Pembuangan Limbah oleh sektor industri
    c. Reklamasi pantai
    d. Rusaknya ekosistem laut dan terumbu karang
    e. Pembukaan lahan
2. Kendala juga dihadapi dalam mendukung Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan yang terjadi pada musim kemarau yang membuat volume air sungai berkurang di Kab/Kota, terjadi pencemaran air akibat pengerukan atau pemotongan tebing tanah untuk pelebaran jalan dan *influent* lain melalui selokan-selokan air yang ada di sekitar waduk di Batam.
3. Dalam pelaksanaan pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan masih terdapat keterbatasan sumber daya, baik dari sisi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, maupun anggaran. Pencapaian indikator pembangunan memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* masih terjadi dan sulit terdeteksi secara dini akibat keterbatasan jangkauan pengawasan. Di sisi lain, sebagian pelaku usaha kelautan dan perikanan belum sepenuhnya patuh terhadap ketentuan perizinan, pelaporan usaha serta penerapan ketentuan teknis dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
4. Dalam upaya pelaksanaan pemanfaatan Sumber Daya Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan masih terdapat keterbatasan sumber daya, baik dari sisi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, maupun anggaran. Pencapaian indikator pembangunan memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, perlu dilakukan beberapa kegiatan seperti penanaman pohon pinang, sebanyak 80 pohon yang berlokasi di Bandara RHF Tanjungpinang, penanaman pohon cemara udang sebanyak 20 pohon yang berlokasi di antara jembatan dan Gedung LAM tepi laut Tanjungpinang, penanaman *Cover crop* (tanaman rambat penutup tanah sebanyak 4000 *polybag*

yang berlokasi di lereng seputaran mesjid raya dompak dan bibit tanaman buah sebanyak 222 bibit terdiri dari bibit mangga 100 batang dan bibit alpukat 122 batang yang berlokasi di Pulau Penyengat Tanjungpinang.

F. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan peningkatan indikator kualitas lingkungan hidup Provinsi dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya dengan cara sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

   Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mematuhi aturan dan tidak melakukan pencemaran terhadap air laut dengan cara membuang sampah dilaut. Selain itu pemerintah juga harus tegas kepada oknum atau pihak perusahaan yang melakukan pembuangan limbah yang tidak diolah atau tidak aman bagi lingkungan, serta kepada perusahaan yang melakukan kegiatan reklamasi pantai agar patuh pada peraturan yang berlaku. Pemerintah Daerah dalam hal ini baik Kabupaten/Kota juga Provinsi harus melakukan pemantauan air laut secara periodik yaitu 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 22 tahun 2021.

2. Indeks Kualitas Air (IKA)

   Alternatif solusi yang di lakukan agar Indeks Kualitas Air (IKA) dapat di tingkatkan yaitu dengan cara:

   a. Ketersediaan anggaran untuk melakukan pemantauan

   b. Melakukan pemantauan kualitas air sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebanyak 4 kali pemantau dalam setahun.

3. Pendampingan dan pembinaan teknis bagi pelaku usaha perikanan, mencakup pengolahan air limbah sederhana menggunakan sistem filtrasi mandiri, penerapan praktik budidaya udang yang efisien dan berkelanjutan, serta pendampingan dalam pengurusan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) untuk memastikan standar produksi terpenuhi. Selanjutnya, perlu dilakukan sosialisasi kepatuhan terkait perpanjangan sertifikasi HACCP, SKP dan penerapan standar teknis budidaya untuk meningkatkan kualitas produk dan keamanan pangan. Pengawasan lapangan rutin dilakukan untuk memastikan praktik usaha perikanan sesuai ketentuan, meminimalkan dampak lingkungan dan mencegah praktik yang merugikan sumber daya kelautan yang disejalankan dengan penguatan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan pemberdayaan masyarakat pesisir serta pulau-pulau kecil sebagai mitra pengawasan partisipatif, sehingga deteksi dini pelanggaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

4. Indeks Kualitas Udara (IKU)

   Alternatif solusi yang di lakukan untuk meningkatkan indeks kualitas udara (IKU) adalah dengan cara:

a. Pemerintah Daerah dalam hal ini baik Kabupaten/Kota juga Provinsi harus melakukan pemantauan udara secara periodik yaitu 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 22 tahun 2021.

b. Melaksanakan kembali kegiatan uji emisi, karena sejak tahun 2014 uji emisi sudah tidak dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

5. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Penyediaan ruang terbuka hijau di suatu kota tidak hanya selalu dari pemerintah, seperti penyediaan taman kota, jalur hijau, dan lainnya. Namun, penyediaan ruang terbuka hijau juga dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran penghuni kota akan pentingnya ruang terbuka hijau. Tahun 2026 dilakukan penghijauan di ruang terbuka hijau di Tembeling Kab. Bintan, pelaksanaan penghijauan lingkungan di Kab. Bintan, Kab. Karimun dan Kota Batam serta penanaman mangrove di Kab. Lingga, Kota Batam dan Kab. Bintan. Pelaksanaan pemantauan air permukaan di lokasi dam/embung Kota Tanjungpinang, Kab. Bintan dan kota Batam. Pemantauan udara di Kota Batam dan Tanjungpinang melalui AQMS dan *passive sampler* serta pengelolaan pesisir laut melalui program Dinas Kelautan dan Perikanan.

G. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Tabel 7.3.45 Anggaran yang mendukung penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup	376.608.737,00	148.907.020,00	39,54
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3 (dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	72.117.000,00	71.758.000,00	99,5
Program Pengelolaan Persampahan	1.197.821.048,00	1.187.931.990,00	99,17
Program Pengelolaan Hutan	2.288.386.160,00	1.966.812.325,00	85,95
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	257.192.505,00	250.764.855,00	97,5
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	689.204.554,00	669.728.925,00	97,17
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.200.000.000,00	497.668.234,00	41,47
Total	**6.081.330.004,00**	**4.793.571.349,00**	**78.82**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp6.081.330.004,00 terealisasi sebesar Rp4.793.571.349,00 atau 78,82%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp1.287.758.655,00 (21,18%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Indeks Kualitas lingkungan Hidup (102,86%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (78,82%) dengan efesiensi 24,04%.

7.3.5.5. Sasaran Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Berkarakter

7.3.5.5.1. Indeks Pembangunan Manusia



Masyarakat Kepulauan Riau harus memiliki keunggulan agar mampu mengelola sumber daya pembangunan dan mampu bersaing baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter SDM harus memperoleh pendidikan bermutu dan kualitas hidup yang sehat. Indeks Pembangunan Mansuia pada Tahun 2025 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 80,53 Indeks dari target sebesar 77,39 Indeks dan terealisasi sebesar 104%.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu ukuran komposit yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM mencerminkan kualitas hidup masyarakat dengan mempertimbangkan umur harapan hidup sebagai indikator kesehatan, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sebagai indikator pendidikan, serta pengeluaran per kapita sebagai indikator kesejahteraan ekonomi. Melalui pengukuran ini, IPM berfungsi sebagai tolak ukur penting dalam menilai kemajuan pembangunan, membandingkan antarwilayah, serta menjadi dasar perumusan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia diperoleh melalu hal-hal sebagai berikut:

1. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

2. Rata-Rata Lama Sekolah

   Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

3. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan

   UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok menurut status capaiannya. Adapun pengelompokan tersebut adalah:

1. sangat tinggi: IPM ≥ 80
2. tinggi: 70 ≤ IPM < 80
3. sedang: 60 ≤ IPM < 70
4. rendah: IPM < 60

Peningkatan IPM Kepulauan Riau 2025 didukung oleh peningkatan ketiga dimensi penyusunnya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata- rata Lama Sekolah (RLS), dan dimensi standar hidup layak yang diukur melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter dilihat dari indeks pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Realisasi indikator Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 80,53 Indeks dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 77,39 Indeks sehingga capaian kinerja sebesar 104% atau dalam kategori “Sangat Baik”.

Tabel 7.3.46 Capaian Indeks Pembangunan Manusia

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pembangunan Manusia	77,39 Indeks	80,53 Indeks	104%

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia secara menyeluruh, yang mencerminkan kualitas hidup penduduk melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat

   Peningkatan IPM didukung oleh perbaikan dalam angka harapan hidup, yang mengindikasikan semakin baiknya akses dan kualitas layanan kesehatan, peningkatan kesadaran pola hidup sehat, serta perbaikan gizi dan sanitasi. Program-program kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit telah berkontribusi pada pencapaian ini.

Grafik 7.3.17 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kepulauan Riau (tahun), 2020–2025



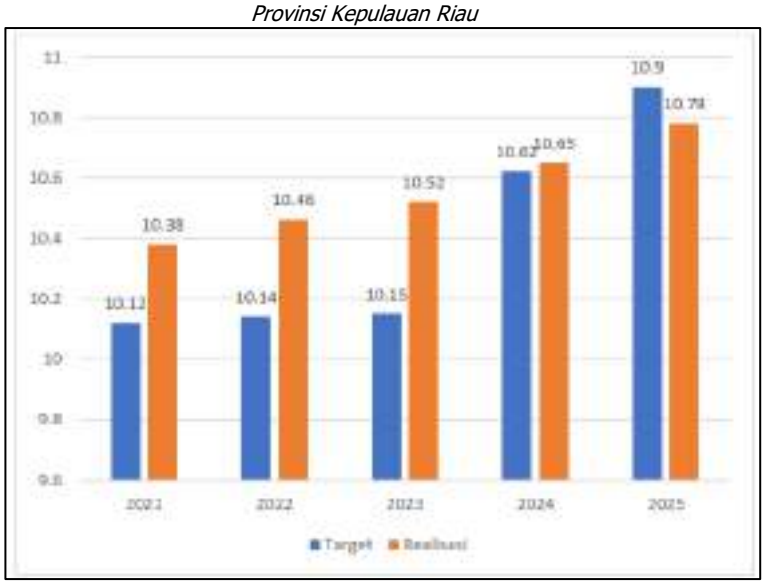
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

   Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2025, UHH Kepulauan Riau telah meningkat sebesar 1,21 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,32 persen per tahun. Pada 2020, UHH Kepulauan Riau sebesar 74,25 tahun dan pada 2025 mencapai 75,46 tahun. UHH tahun 2025 meningkat 0,34 tahun atau 0,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2024 yang sebesar 0,29 persen per tahun.

2. Pengetahuan (Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah)

   Dimensi pengetahuan menunjukkan perkembangan positif seiring dengan peningkatan rata-rata lama sekolah dan perluasan akses pendidikan. Kebijakan seperti wajib belajar 12 tahun, peningkatan kualitas guru, serta digitalisasi pembelajaran turut mendorong capaian ini.

Grafik 7.3.18 Pencapaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun Provinsi Kepulauan Riau



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Capaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,12%. Dimana pada tahun 2024 Capaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun Provinsi Kepulauan Riau sebesar 10,65 Tahun meningkat menjadi 10,78 Tahun pada tahun 2025. Realisasi Capaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 tidak mencapai target hal ini dikarenakan penyesuaian terhadap wajin belajar dari 9 Tahun menjadi 12 Tahun.

Grafik 7.3.19 Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Capaian kinerja Harapan Lama sekolah pada tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,08%. Dimana pada tahun 2024 peningkatan Harapan Lama Sekolah hanya sebesar 13,27 Tahun meningkat menjadi 13,28 Tahun pada tahun 2025. Capaian Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebesar 13,28 Tahun dari target yang di tetapkan sebesar 13,28 Tahun.

Grafik 7.3.20 Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Kota Tanjungpinang merupakan penyumbang Realisasi kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) terbesar di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025, selanjutnya Kabupaten Bintan menyumbang HLS pada posisi 13,46 Tahun, disusul Kota Batam diurutan ketiga dengan realisasi HLS di tahun 2025 pada angka 13,57 Tahun serta Realisasi kinerja HLS terkecil berada di Kabupaten Lingga dengan angka 12,77 Tahun.

3. Standar Hidup Layak (Pengeluaran Riil per Kapita)

   Kenaikan pengeluaran riil per kapita mencerminkan perbaikan kesejahteraan ekonomi dan daya beli masyarakat. Hal ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi, program bantuan sosial, dan penurunan tingkat kemiskinan, yang memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan lebih baik.

Grafik 7.3.21 Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2025



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Pada 2025, pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) Kepulauan Riau mencapai 15,88 juta rupiah per tahun. Capaian ini meningkat 308 ribu rupiah atau 1,98 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2024 yang sebesar 2,33 persen per tahun.

Pada tahun 2025, dua dari tujuh kabupaten/kota di Kepulauan Riau mencapai status pembangunan manusia “sangat tinggi” (IPM ≥ 80), yaitu Kota Batam dengan capaian IPM 83,80 dan Kota Tanjungpinang dengan capaian IPM 82,02. Sementara lima diantaranya mencapai status pembangunan manusia “tinggi” (70 ≤ IPM < 80), yaitu Kabupaten Natuna

dengan capaian IPM 78,94, Kabupaten Bintan 78,65, Kabupaten Karimun 76,08, Kabupaten Kepulauan Anambas 74,07, dan Kabupaten Lingga dengan capaian IPM 73,82. Dalam kurun waktu 2020-2025, terjadi peningkatan status pembangunan manusia dari "tinggi" ke "sangat tinggi" yang dialami Kota Tanjungpinang, yaitu sejak 2022.



Gambar 7.3.1 IPM Menurut Kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan Status Pembangunan Manusia, 2025

Secara keseluruhan, tren positif dan stabil IPM dari 2020 hingga 2025 menunjukkan bahwa pembangunan manusia berjalan dalam arah yang tepat dan terukur. Untuk mempertahankan dan mempercepat laju peningkatan ini, diperlukan strategi yang lebih terfokus pada pemerataan akses layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ketahanan ekonomi keluarga, serta peningkatan kualitas hidup kelompok rentan dan daerah tertinggal. Sinergi antar-sektor dan komitmen berkelanjutan menjadi kunci dalam mencapai target IPM yang lebih tinggi di masa mendatang.

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Tabel 7.3.47 Tren Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Dimensi 2020-2025

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umur Panjang dan Hidup Sehat							
Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	tahun	74,25	74,36	74,62	74,90	75,12	75,46
Pengetahuan							
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12,87	12,98	12,99	13,05	13,27	13,28
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	10,12	10,18	10,37	10,41	10,50	10,72
Standar Hidup Layak							
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	ribu rupiah	14.209	14.122	14.469	14.598	15.573	15.881

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Seluruh indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2025. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir meningkat secara konsisten dari 74,25 tahun pada 2020 menjadi 75,46 tahun pada 2025, mencerminkan perbaikan derajat kesehatan masyarakat. Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) naik dari 12,87 tahun menjadi 13,28 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga mengalami peningkatan dari 10,12 tahun menjadi 10,72 tahun, yang mengindikasikan semakin membaiknya akses dan partisipasi penduduk dalam pendidikan. Selanjutnya, pada dimensi standar hidup layak, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan menunjukkan kenaikan dari 14.209 ribu rupiah pada 2020 menjadi 15.881 ribu rupiah pada 2025, menandakan

adanya perbaikan daya beli dan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.

Grafik 7.3.22 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau,2020–2025



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Dapat dilihat pada grafik diatas, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau meningkat setiap tahunnya, Berdasarkan data tren IPM dari tahun 2020 hingga 2025, terlihat adanya peningkatan yang konsisten dan signifikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengalami kenaikan bertahap dari 76,46 pada tahun 2022, menjadi 79,08 pada tahun 2023, kemudian 79,89 pada tahun 2024, dan mencapai 80,53 pada tahun 2025. Perkembangan ini mencerminkan kemajuan yang berkelanjutan dan upaya sistematis dalam meningkatkan kualitas hidup manusia.

Pada tahun 2025, IPM Kepri mencapai 80,53, meningkat 0,64 poin atau 0,80 persen dibandingkan tahun 2024. Perhitungan ini dilakukan dengan rumus:

$\Delta IPM = IPM\ 2025 - IPM\ 2024$ $\Delta IPM = 80{,}53 - 79{,}89$

$\Delta IPM = 0{,}64$

Kenaikan 0,64 poin ini menunjukkan pertumbuhan absolut IPM dalam satuan indeks. Angka ini mengkonfirmasi bahwa pembangunan manusia di Kepri terus mengalami kemajuan nyata dari tahun ke tahun. Peningkatan sebesar 0,64 poin tersebut setara dengan kenaikan 0,80 persen dibandingkan tahun 2024.

Berdasarkan data realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2020 hingga 2025, dapat dilihat bahwa IPM mengalami peningkatan yang stabil dan konsisten setiap tahunnya. Tren positif ini mencerminkan kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan manusia di provinsi tersebut.

Perkembangan Tahunan:

1. 2020: 75,59;
2. 2021: 75,79 (+0,20)
3. 2022: 78,48 (+2,69)

4. 2023: 79,09 (+0,61)
5. 2024: 79,89 (+0,80)
6. 2025: 80,53 (+0,64)

Periode 2020–2022: IPM menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 2,69 poin. Hal ini mengindikasikan adanya percepatan pembangunan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat pasca-tantangan awal pandemi.

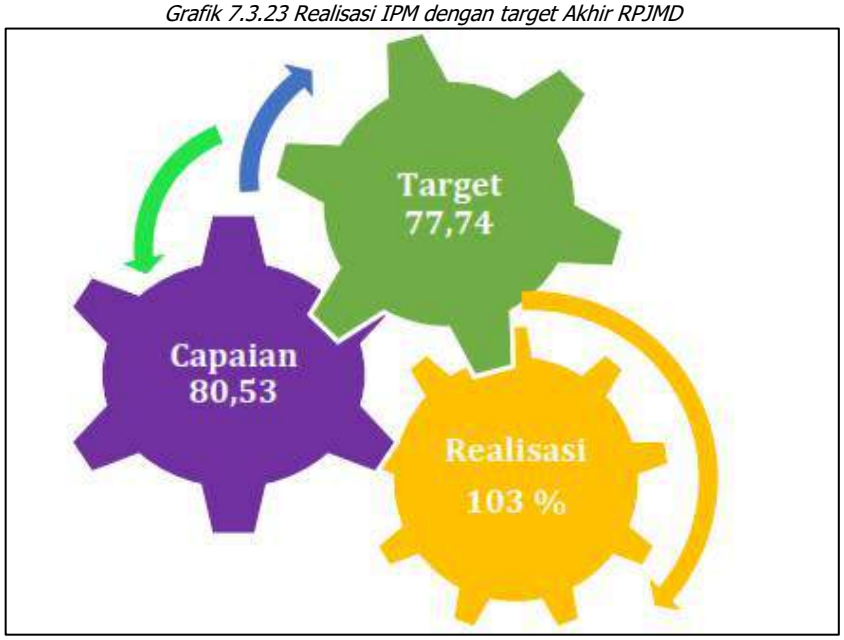
Periode 2023–2025: Peningkatan tetap terjaga meskipun dengan laju yang lebih stabil, menunjukkan bahwa upaya pembangunan manusia telah masuk dalam fase pemantapan dan konsolidasi.

Capaian Kinerja 2024–2025:Pada tahun 2025, IPM Provinsi Kepulauan Riau mencapai 80,53, meningkat sebesar 0,64 poin dari tahun 2024 yang sebesar 79,89. Persentase kenaikannya adalah 0,80%. Capaian ini sekaligus menandai level tertinggi IPM dalam kurun waktu enam tahun terakhir.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 80,53 indeks dengan target sebesar 77,74 indeks sehingga capaian kinerja sebesar 103%.

Grafik 7.3.23 Realisasi IPM dengan target Akhir RPJMD



Sumber : Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau sebesar 80,53 sedangkan Indeks Pembangunan Manusia Nasional sebesar 75,90. Hal ini menunjukkan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau diatas Indeks Pembangunan Manusia Nasional sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dikategorikan memiliki Tingkat Pembangunan Manusia yang lebih baik dari rata-rata Nasional. Dampak Positifnya Provinsi Kepulauan Riau cenderung memiliki lebih banyak peluang investasi, lebih tinggi kualitas tenaga kerja, dan akses lebih baik terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, ini bisa menjadi indikator bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau lebih fokus pada Pembangunan manusia yang berdampak langsung kepada Kesejahteraan masyarakat, Hal ini dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 7.3.2 Indikator Provinsi Kepulauan Riau dan IPM Nasional Tahun 2025

Grafik 7.3.24 Indikator Provinsi Kepulauan Riau dan IPM Nasional Tahun 2021- 2025



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Dibandingkan Provinsi lain di wilayah Sumatera, IPM Provinsi Kepulauan Riau merupakan yang tertinggi dan Peringkat ketiga se-Indonesia. Pada tahun 2025, IPM Kepri mencapai 80,53, meningkat 0,64 poin atau 0,80% dibandingkan tahun 2024. Mengalami Graduasi dari kategori Tinggi ke Sangat Tinggi.

E. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang mendukung ketercapaian dalam mempengaruhi pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 antara lain adalah:

1. Dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, peningkatan harapan hidup dan akses layanan kesehatan, sebagai berikut : Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) jika angka tinggi menunjukkan kesehatan ibu dan bayi yang buruk dan berisiko menurunkan harapan hidup, sehingga menurunkan IPM. AKI dan AKB yang tinggi menandakan masalah serius pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, memerlukan upaya komprehensif untuk perbaikan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam rangka menurunkan AKI dan AKB upaya yang dilakukan untuk sebagai berikut:

   a. Melaksanakan desiminasi hasil pelaksanaan AMPSR di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota sebagai bahan pembelajaran agar kasus kematian serupa tidak terjadi lagi dan AMPSR dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

   b. Berkolaborasi dengan organisasi profesi seperti IBI, IDAI, dan POGI dalam melakukan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam pemberian pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk pelayanan reproduksi.

   c. Melaksanakan bimbingan teknis pelayanan kesehatan ibu dan anak ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan puskesmas.

   d. Melakukan *feedback* data program pelayanan kesehatan ibu dan anak secara berkala.

   Selain upaya tersebut terdapat beberapa upaya lainnya, seperti pencegahan Stunting, , yaitu bekerja sama dengan instansi terkait dalam program sensitif untuk menurunkan angka stunting, yang berdampak langsung pada angka Harapan Hidup dengan aktifitas yakni pendampingan bagi keluarga beresiko stunting, penguatan dan pendampingan Tim Pendampingan Keluarga (TPK) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

   Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yaitu memperkuat gugus tugas KLA di seluruh wilayah Kepri untuk memastikan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dalam bentuk intervensi pendampingan gugus tugas KLA Kab/Kota, Sosialisasi/Advokasi Pencegahan kekerasan terhadap anak.

   Program Perlindungan Anak, yaitu memaksimalkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui sistem layanan komprehensif, guna menjamin keamanan dan kesejahteraan generasi masa depan dalam bentuk pencegahan dan penanganan korban anak yang memerlukan perlindungan khusus yang diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran keluarga (PUSPAGA) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

2. Dari dimensi Pengetahuan, peningkatan rata-rata lama sekolah dan partisipasi pendidikan, sebagai berikut: Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Rata Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun seperti Pembangunan Unit Sekolah Baru di wilayah Kota Batam yaitu pembangunan sekolah menengah atas (SMA) dan lanjutan Pembangunan Unit Sekolah Baru untuk jenjang Pendidikan

Khusus, juga di lakukan pembangunan/Rehabilitasi ruang kelas belajar, Pembangunan sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah, Pemberian Seragam Gratis, Pemberian Bantuan Biaya Personil bagi peserta didik berupa Bantuan Transportasi Darat, Bantuan Transportasi Laut, Bantuan Magang/PKL, Bantuan Makan dan minum dan juga Pembebasan biaya Pendidikan (SPP) di Satuan Pendidikan dalam rangka mengurangi beban orang tua dalam biaya pendidikan sehingga anak anak bisa tetap bersekolah. Upaya lainnya dalam mendukung ketercapaian indikator Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun, Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya, sebagai berikut :

a. Peningkatan kesejahteraan PTK melalui skema berbagai insentif dan perbaikan karir PTK.
b. Penguatan pencegahan putus sekolah, melalui pendataan anak berisiko putus sekolah dan pendampingan intensif
c. Optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP/KIP) agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
d. Perluasan pendidikan nonformal dan kesetaraan (Paket A, B, C) bagi anak putus sekolah dan usia dewasa
e. Peningkatan layanan pendidikan inklusif, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus dan kelompok rentan
f. Kerja sama lintas sektor (pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, desa) dalam penanganan anak tidak sekolah
g. Penyediaan sekolah terbuka dan kelas jauh, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan
h. Pemanfaatan teknologi pembelajaran (kelas *daring*, *blended learning*) untuk fleksibilitas belajar
i. Penguatan peran pemerintah daerah, termasuk beasiswa daerah dan kebijakan afirmatif
j. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat, melalui kampanye kesadaran pentingnya pendidikan
k. Penurunan angka perkawinan anak, melalui edukasi dan regulasi perlindungan anak
l. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, agar peserta didik termotivasi menyelesaikan jenjang sekolah
m. Penguatan sistem data pendidikan, untuk pemantauan partisipasi sekolah secara akurat dan berkelanjutan.
n. Pengembangan dan adaptasi kurikulum berbasis industri., Program *Teaching factory*, program *link and macth*, pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dan Uji Sertifikasi Profesi pendidik.

o. Peningkatan standar kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui berbagai pelatihan kompetensi, peningkatan jumlah guru yang bersertifikasi dan distribusi guru yang lebih merata antar satuan pendidikan dan antar wilayah.

3. Standar Hidup Layak, Penguatan perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja, sebagai berikut: Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, seperti Program Keluarga Berencana (KB) dengan mengatur jarak kelahiran dan mengedukasi kesehatan reproduksi untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, yang menjadi indikator penting dalam dimensi kesehatan IPM dengan intervensi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Membangun jejaring antar lembaga penyedia layanan untuk meningkatkan keluarga sejahtera sebagai unit terkecil pembangunan manusia dalam bentuk kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan pelaksanaan fasilitasi, pendampingan, pengembangan, dan penguatan penyiapan pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK).

   Selain upaya diatas juga terdapat upaya lainnya seperti Pelatihan Industri Rumah Tangga, Hingga laporan terakhir, Provinsi Kepulauan Riau telah memberikan pelatihan kepada peserta di kabupaten/kota sebanyak 610 peserta, guna menciptakan wirausaha baru dari kalangan perempuan.

   Kemandirian Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga (PEKA) hadir untuk memberikan perhatian khusus dan dukungan kepada perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga agar mampu mengelola usaha mandiri untuk menekan angka pengangguran di sektor rumah tangga.

   Penguatan Kapasitas UMKM, melalui program "Peningkatan Kualitas Keluarga", Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan pelatihan keterampilan (seperti tata boga dan industri kreatif) yang memungkinkan perempuan memiliki penghasilan sendiri tanpa harus bergantung pada sektor formal.

   Pengarusutamaan *Gender* (PUG) juga mendorong keterlibatan perempuan yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi dan ketenagakerjaan guna meningkatkan yang secara tidak langsung berdampak pada penurunan angka pengangguran perempuan.

Dalam pelaksanaan terdapat permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, sebagai berikut:

1. Dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, kendala dalam peningkatan harapan hidup dan akses layanan kesehatan, sebagai berikut:

   a. Masih adanya persalinan yang ditolong oleh non tenaga kesehatan dan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di non fasilitas pelayanan kesehatan. Masih banyak masyarakat di wilayah pulau-pulau di kabupaten/ kota yang lebih memilih untuk bersalin di rumah karena berbagai macam alasan diantaranya faktor tradisi yang turun menurun, wilayah kepulauan yang membuat jarak antara rumah dengan fasilitas pelayanan kesehatan cukup jauh

dan moda transportasi yang kurang memadai, fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang memadai dalam pelayanan persalinan dan pelayanan bayi baru lahir;

b. Masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta alat kesehatan di sebagian fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi. Salah satunya yaitu alat USG, logistik pemeriksaan laboratorium bagi ibu, bayi, dan calon pengantin, alat stabilisasi ibu dan bayi dengan komplikasi, fasilitas dalam ambulans sebagai sarana rujukan kegawatdaruratan;

c. Sistem rujukan maternal neonatal yang belum berjalan optimal;

d. Pelaksanaan Audit Maternal Periatal (AMP) di kabupaten/ kota belum optimal, efektif, dan sesuai dengan yang diharapkan dalam hal jumlah atau frekuensi pertemuan dan jumlah kasus yang dikaji serta belum menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti;

e. Masih adanya pelayanan kesehatan ibu hamil yang belum memenuhi standar dan pemeriksaan yang belum adekuat sehingga belum mampu melakukan pendeteksian risiko komplikasi pada ibu hamil. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dalam pendeteksian risiko komplikasi pada ibu hamil, saat ini dibuat kebijakan pelayanan kesehatan ibu hamil 6 kali (K6) dengan pemeriksaan oleh dokter minimal 1 (satu) kali pada trimester pertama dan 1 (satu) kali pada trimester kedua disertai dengan pemeriksaan kehamilan menggunakan USG oleh dokter. Terdapat kesenjangan cakupan antar kabupaten/ kota dikarenakan belum meratanya dokter terlatih USG di puskesmas, dan keterbatasan akses pelayanan USG bagi ibu hamil yang berdomisili di pulau-pulau;

f. Masih adanya persalinan yang ditolong oleh non tenaga kesehatan dan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di non fasilitas pelayanan kesehatan. Masih banyak masyarakat di wilayah pulau-pulau di kabupaten/ kota yang lebih memilih untuk bersalin di rumah karena berbagai macam alasan diantaranya faktor tradisi yang turun menurun, wilayah kepulauan yang membuat jarak antara rumah dengan fasilitas pelayanan kesehatan cukup jauh dan moda transportasi yang kurang memadai, fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang memadai dalam pelayanan persalinan dan pelayanan bayi baru lahir;

g. Masih belum meratanya distribusi tenaga kesehatan spesialis seperti dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak, dokter spesialis anestesi, dokter spesialis penyakit dalam, dan dokter spesialis lainnya. Dokter spesialis banyak terdistribusi di daerah perkotaan sedangkan di daerah DTPK seperti Kabupaten Kepulauan Anambas masih minim;

h. Program kesehatan reproduksi calon pengantin dan skrining layak hamil pada Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum berjalan optimal;

i. Koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam program pelayanan kesehatan ibu, anak, serta reproduksi belum optimal.

2. Dari dimensi Pengetahuan, kendala yang dihadapi dalam peningkatan rata-rata lama sekolah dan partisipasi pendidikan, sebagai berikut:

   a. Faktor Geografis, yaitu jarak antar sekolah yang jauh, sehingga keterbatasan akses terhadap satuan pendidikan terutama yang ada di Pulau Pulau; hal ini bisa di lihat dengan Angka Partisipasi yang tinggi di daerah perkotaan seperti Kota Tanjungpinang dan Kota Batam;

   b. Pemerataan Sarana dan Prasarana yang belum seluruhnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;

   c. Tingkat kesejahteraan sosial calon peserta didik, khususnya dari keluarga berpenghasilan rendah.

3. Dari dimensi Standar Hidup Layak, kendala yang dihadapi dalam penguatan perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja, yakni rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang belum mencapai target akibat putus sekolah dan ketimpangan akses pendidikan khususnya pada kelompok perempuan kelompok rentan dan faktor ekonomi keluarga menyebabkan anak usia sekolah harus bekerja atau tidak melanjutak pendidikan ke jenjang lebih tinggi sehinga meningkatkan resiko tingginya angka kemiskinan, pernikahan dini (angka kematian ibu dan kekerasan dalam rumah tangga meningkat) serta kekerasan terhadap anak. Kemudian pendapatan masyarakat yang relatif rendah dan belum merata terutama pada kelompok rentan dan masyarakat miskin serta keterbatasan lapangan kerja yang layak dan rendahnya keterampilan tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang tenaga kerja.

F. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya dengan cara sebagai berikut:

1. Dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, kedepannya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan melaksakanan, sebagai berikut:

   a. Mengusulkan pengadaan buku KIA sebagai media KIE melalui anggaran APBD/P;

   b. Melengkapi sarana prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau puskesmas dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi. Salah satunya yaitu logistik pemeriksaan laboratorium bagi ibu, bayi, dan calon pengantin, alat stabilisasi ibu dan bayi dengan komplikasi, fasilitas dalam ambulans sebagai sarana rujukan kegawatdaruratan;

c. Optimalisasi sistem rujukan penanganan kasus komplikasi pada ibu dan bayi melalui optimalisasi grup komunikasi *online* yang melibatkan fasyankes tingkat pertama, fasyankes rujukan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta penyusunan SOP sistem rujukan kesehatan ibu dan anak, termasuk di dalamnya penunjukan dokter spesialis kandungan dan anak sebagai penanggujawab wilayah yang memberikan arahan kepada tenaga kesehatan di wilayah kerja puskesmas untuk stabilisasi pasien ibu dan bayi sebelum merujuk;

d. Melakukan kegiatan Audit Maternal Periatal (AMP) sebagai proses pembelajaran kasus kematian ibu dan bayi agar tidak terulang lagi dengan kasus yang sama. Perencanaan kegiatan AMP di tingkat kabupaten/ kota harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu minimal 4 kali dalam setahun dan semua kasus dikaji. AMP tetap harus dilakasanakan meskipun tidak ada kasus kematian yang terjadi. Pelaksanaan AMP dapat diselenggarakan menggunakan dana DAK Fisik Kabupaten/ Kota dengan menu Surveilans dan Tatalaksana Kesehatan Ibu dan Bayi;

e. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi. Beberapa diantaranya yaitu pelatihan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, pelatihan integrasi Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan gizi buruk, pelatihan penanganan asfiksia dan BBLR, pelatihan dokter dalam pelayanan KIA termasuk penggunaan USG, pelatihan bidan dalam pelayanan KIA, dan pelatihan lainnya;

f. Peningkatan koordinasi dengan organisasi profesi (POGI, IBI, IDAI, dll) dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, salah satunya kolaborasi dengan IDAI dalam pelaksanaan *Pedistrician Social Responsibility* (PSR);

g. Pelaksanaan refreshing deteksi risiko dini dan penapisan faktor risiko ibu dan bayi bagi bidan-bidan di wilayah kerja puskesmas;

h. Penguatan peran lintas sektor dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan pemberdayaan masyarakat dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), salah satunya kolaborasi dengan Kementerian Agama terkait upaya pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin dan menginisiasi penyusunan SE Gubernur terkait pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin;

i. Mendorong kabupaten/ kota dalam pembentukan jejaring, *skrining* layak hamil, ANC, dan *stunting*;

j. Optimalisasi dan monitoring pemanfaatan JKN, DAK, Dekonsentrasi untuk penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);

k. Melakukan advokasi kepada kepala daerah untuk pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

l. Pencegahan *Stunting* dengan penguatan kerja sama dengan instansi terkait dalam program sensitif untuk menurunkan angka *stunting*, yang berdampak langsung pada angka Harapan Hidup dengan aktifitas yakni pendampingan bagi keluarga beresiko *stunting*, penguatan dan pendampingan Tim Pendampingan Keluarga (TPK) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) .

m. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dengan memperkuat gugus tugas KLA di seluruh wilayah Kepri untuk memastikan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dalam bentuk intervensi pendampingan gugus tugas KLA Kab/Kota, Sosialisasi/Advokasi Pencegahan kekerasan terhadap anak.

n. Perlindungan Anak dengan memaksimalkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui sistem layanan komprehensif, guna menjamin keamanan dan kesejahteraan generasi masa depan dalam bentuk pencegahan dan penanganan korban anak yang memerlukan perlindungan khusus yang diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran keluarga (PUSPAGA) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

2. Dari dimensi Pengetahuan, kedepannya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan melaksakanan, sebagai berikut:

   a. Pemerataan Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan USB, RKB, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan kegiatan pembangunan fisik pendidikan lainnya, khususnya di wilayah yang angka partisipasinya masih rendah;

   b. Melanjutkan program Pembebasan SPP, Pemberian Bantuan bagi siswa tidak mampu melalui bantuan transportasi darat dan laut, dan juga bantuan bagi siswa yang melaksanakan magang;

   c. Melakukan koordinasi secara terus menerus baik di internal Dinas Pendidikan, maupun dengan Instansi/lembaga terkait, serta pemerintah pusat dalam rangka mendorong pemenuhan SPM di bidang pendidikan khususnya jenjang menengah;

   d. Pengarusutamaan *Gender* (PUG) dengan penyelenggaraan sekolah Perempuan paket C bagi Perempuan kelompok rentan yang putus sekolah serta penguatan kelembagaan organisasi wanita.

3. Dari dimensi Standar Hidup Layak, kedepannya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan melaksakanan, sebagai berikut:

   a. Keluarga Berencana (KB), dengan mengatur jarak kelahiran dan mengedukasi kesehatan reproduksi untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, yang menjadi indikator penting dalam dimensi kesehatan IPM dengan intervensi pelaksanaan kegiatan penguatan dan pendampingan Generasi Berencana (GenRe).

b. Peningkatan Keluarga Sejahtera dengan membangun jejaring antar lembaga penyedia layanan untuk meningkatkan keluarga sejahtera sebagai unit terkecil pembangunan manusia.

c. Pelatihan Kemandirian Ekonomi dengan menyelenggarakan pelatihan peningkatan *Life skill* dalam upaya peningkatan kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan pada bidang ekonomi.

d. Peningkatan Koordinasi melalui Penguatan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) yang melibatkan Bappeda, disnaker, Dinas Pendidikan, disperindag, Lembaga Pendidikan vokasi, Konsersium Politeknik, Kadin, asosiasi Perusahaan dan LSP serta meningkatkan kerja sama dengan industri dan dunia usaha (DUDI) agar pelatihan yang diberikan lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Melakukan pelatihan berbasis kompetensi yang lebih sinkron dengan perkembangan industri.

e. Penyusunan Strategi daerah untuk revitalisasi Pelatihan Vokasi yang fokus pada Optimalisasi Sistem Informasi Pasar kerja, Penguatan Peran DUDI dalam Proses Pendidikan Vokasi, Penguatan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebutuhan Pasar Kerja, Meningkatkan relevansi dan aksesbilitas sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Terwujudnya kolaborasi rise inovasi dan Hilirisasi produk oleh akademisi, industri masyarakat dan Pemerintah daerah serta Monitoring dan Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Pelatihan Vokasi.

G. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

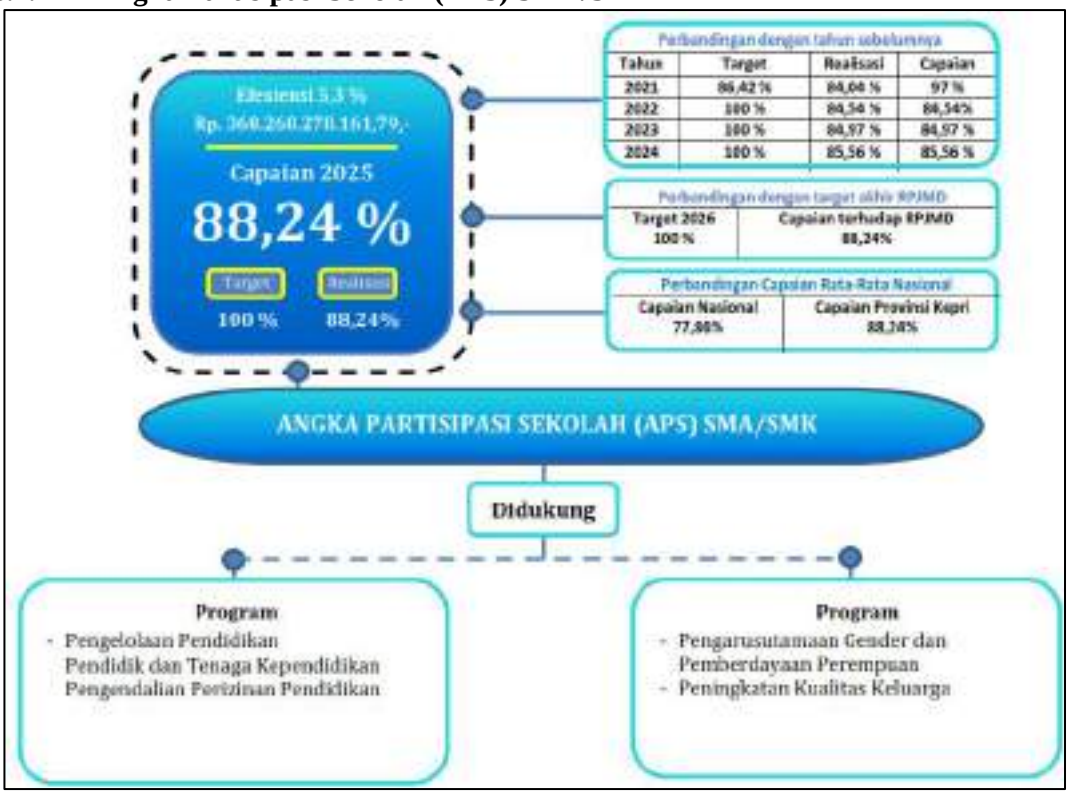
Tabel 7.3.48 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Perekonomian dan Pembangunan	351.320.920,00	337.295.059,00	96,01
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	360.251.470,00	337.725.150,00	93,25
Program Pengelolaan Pendidikan	365.322.687.666,00	302.664.866.696,00	82,85
Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	187.656.000,00	153.676.514,00	81,89
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	42.439.000,00	26.028.317,00	61,33
Program Pengembangan Kurikulum	114.475.500,00	70.519.433,00	61,6
Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	786.089.915,00	691.593.745,00	87,98
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.814.930.080,00	1.774.748.851,00	97,98
Program Perlindungan Khusus Anak	1.975.970.775,00	1.695.907.832,00	85,82
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.008.010.000,00	4.007.400.000,00	99,98
Program Pemeberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	281.756.330,00	257.724.450,00	91,47
Program Pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja	6.023.866.700,00	5.867.448.582,00	97,40
Total	**381.269.454.356,00**	**317.884.934.629,00**	83,38

Dari jumlah anggaran sebesar Rp381.269.454.356,00 terealisasi sebesar Rp317.884.934.629,00 atau 83,38%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp63.384.519.727,00 (16,62%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (104%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (83,38%) dengan efesiensi 20,62%.

7.3.5.6. Sasaran Peningkatan Pemerataan Mutu dan Akses Layanan

7.3.5.6.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK



Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK pada Tahun 2025 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 88,24% dari target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 88,24%.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator penting dalam bidang pendidikan yang menggambarkan persentase penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang mengikuti proses pendidikan pada jenjang formal. APS digunakan untuk menilai sejauh mana akses pendidikan telah dijangkau oleh masyarakat serta mengukur efektivitas program pemerintah dalam meningkatkan keterlibatan siswa di dunia pendidikan. Semakin tinggi nilai APS, semakin baik tingkat ketercakupan pendidikan di suatu daerah, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Perhitungan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK yaitu Jumlah Siswa 16-18 / Penduduk Usia Sekolah x 100%

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja, target Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 100%. Namun, realisasi yang tercapai adalah 88,24% dengan kategori "Baik". Ini menunjukkan adanya kesenjangan sebesar 11,76% antara target yang diharapkan dengan capaian sebenarnya. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa masih ada sebagian dari populasi usia sekolah yang belum dapat berpartisipasi dalam pendidikan.

Tabel 7.3.49 Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	100%	88,24%	88,24%

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Grafik 7.3.25 Tren Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Dari tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan setiap tahunnya, capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami Peningkatan sebesar 3,13%. Dimana pada tahun 2024 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK sebesar 85,56% meningkat menjadi 88,24% pada tahun 2025.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Grafik 7.3.26 Perbandingan Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK dengan Target Akhir RPJMD



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 88,24% dengan target sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 88,24%.

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia sekolah menengah atas telah memperoleh akses pendidikan, namun masih terdapat sekitar 11,76% penduduk usia 16-18 tahun yang belum berpartisipasi dalam pendidikan SMA/SMK. Meskipun demikian, capaian APS SMA/SMK sebesar 88,24% mencerminkan kinerja yang relatif tinggi dan menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan akses pendidikan menengah. Ke depan, capaian ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan afirmatif dan intervensi program yang lebih terarah agar target akhir RPJMD sebesar 100% dapat semakin didekati secara bertahap dan berkelanjutan.

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Pada tahun 2025, Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang SMA/SMK Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kinerja yang sangat baik dan menonjol secara regional. Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebagai provinsi dengan APS SMA/SMK tertinggi, dapat terlihat dalam grafik berikut:

Grafik 7.3.27 APS Provinsi Diantara Wilayah Provinsi Se Sumatera Tahun 2025



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

CapaianAngka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Provinsi Kepulauan Riau dibandingan dengan target nasional pada Tahun 2025 berada diatas target nasional yaitu rata-rata nasional sebesar 77,86% dengan capaian Provinsi Kepulauan Riau sebesar 88,24%. Jika dibandingkan dengan Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau berada pada urutan ke-1 dengan nilai sebesar 88,24% yang disusul oleh Provinsi Sumatera Barat sebesar 85,04%. Namun untuk secara Nasional Pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di tahun 2025 berada di Posisi ke-3 setelah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Bali.

E. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor-faktor yang mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adanya beberapa faktor sebagai berikut:





Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK sepanjang tahun 2025, antara lain:

1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jenjang SMA/SMK/SLB

   Ketersediaan sekolah yang lebih dekat dan memadai mendorong meningkatnya partisipasi siswa usia SMA untuk bersekolah. Dengan kata lain, pembangunan USB SMA/SMK akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi lulusan SMP/MTs untuk melanjutkan pendidikan, terutama di wilayah yang belum terjangkau Sekolah Menengah Atas. Selama tahun 2025 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau telah membangun 2 Unit Sekolah Baru (USB) sebagai berikut:

Tabel 7.3.50 Kegiatan Pembangunan Gedung

Kegiatan	Jumlah	Satuan	Kab/Kota
Pembangunan USB SMA di Rempang Galang	1	Unit	Batam
Lanjutan Pembangunan USB SLBN 2 Batam	1	Unit	Batam

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Berikut data jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jenjang SMA/SMK/SLB di Provinsi Kepulauan Riau 5 Tahun terakhir (2021-2025)

Tabel 7.3.51 Jumlah Pembangunan USB Prov Kepri 2021-2025

Tahun	Jumlah Pembangunan USB			Jumlah
	SMA	SMK	SLB	
2021	0	0	0	**0**
2022	0	0	0	**0**

Tahun	Jumlah Pembangunan USB			Jumlah
	SMA	SMK	SLB	
2023	2	1	0	**3**
2024	0	0	0	**0**
2025	1	0	1	**2**
Jumlah	**3**	**1**	**1**	**5**

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

2. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Jenjang SMA/SMK/SLB

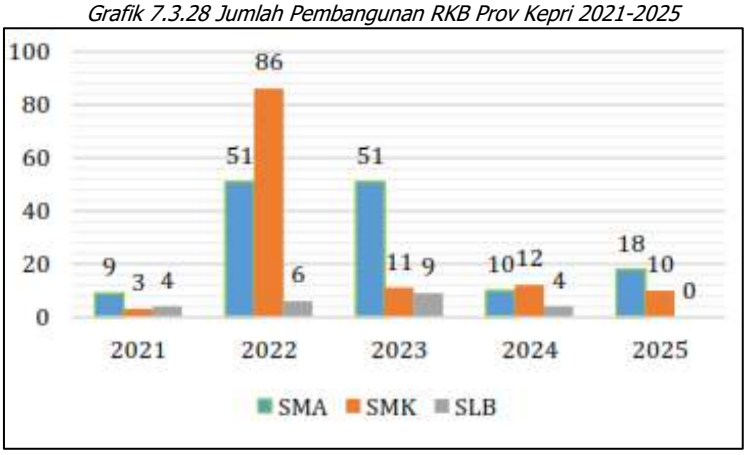
Pembangunan RKB pada jenjang SMA/SMK/SLB merupakan upaya strategis dalam menjamin keberlangsungan layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang berkualitas. Ketersediaan ruang kelas yang memadai mendorong akses pendidikan yang lebih luas serta mengurangi risiko penolakan siswa akibat keterbatasan ruang. Selama tahun 2025 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau telah membangun sebanyak 28 RKB sebagai berikut:

Tabel 7.3.52 Pembangunan RKB di Prov Kepri

Kegiatan	Jumlah	Satuan	Kab/Kota
Pembangunan RKB SMAN 25 Batam	6	Ruang	Batam
Pembangunan RKB SMAN 26 Batam	6	Ruang	Batam
Pembangunan RKB SMAN 29 Batam	4	Ruang	Batam
Pembangunan RKB SMAN 1 Bintan Utara	2	Ruang	Bintan
Pcmbangunan RKB SMKN 10 Batam	6	Ruang	Batam
Pembangunan RKB SMKN 11 Batam	4	Ruang	Batam
Jumlah	**28**	**Ruang**	

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Grafik 7.3.28 Jumlah Pembangunan RKB Prov Kepri 2021-2025



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau



Gambar 7.3.3 Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahun 2025

3. Pembebasan SPP untuk SMA/SMK/SLB Negeri

   Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Kebijakan Pembebasan SPP SMA/SMK/SLB Negeri melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikah (SPP) pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai solusi terhadap kesenjangan akses pendidikan, khususnya pada jenjang SMA/SMK/SLB.

   Pembebasan SPP bagi SMA/SMK/SLB Negeri merupakan kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menjamin akses pendidikan menengah yang adil dan berkelanjutan. Diharapkan pembebasan SPP dapat menghilangkan hambatan biaya sehingga seluruh peserta didik, termasuk dari keluarga kurang mampu, dapat mengakses pendidikan menengah. Keringanan biaya pendidikan mendorong lulusan SMP/MTs untuk melanjutkan ke SMA/SMK/SLB dan menekan angka tidak melanjutkan sekolah. Berikut adalah data jumlah Siswa Penerima SPP Gratis Jenjang SMA/SMK/SLB di Provinsi Kepulauan Riau 2 Tahun terakhir (2024-2025).

Grafik 7.3.29 Jumlah Siswa Penerima SPP Gratis 2024-2025



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

4. Bantuan Seragam Gratis Bagi Peserta Didik baru SMA/SMK dan SLB

   Bantuan seragam gratis bagi peserta didik baru SMA/SMK dan SLB merupakan kebijakan afirmatif yang berorientasi pada keadilan sosial dan perluasan akses pendidikan. Ketersediaan seragam gratis dapat menghilangkan hambatan ekonomi sehingga peserta didik lebih siap dan percaya diri untuk bersekolah. Bantuan seragam juga menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menjaga keberlanjutan pendidikan menengah. Selama tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memberikan bantuan seragam sekolah sebanyak 29.312 Paket sebagai berikut:

Tabel 7.3.53 Jumlah Bantuan Seragam Gratis

Kegiatan	Jumlah 2024	Jumlah 2025	Satuan	Anggaran	Keterangan
Pemberian Bantuan Seragam SMA	16.675	16.514	Paket	5.337.495.000	Siswa baru SMA Negeri se-Kepri
Pemberian Bantuan Seragam SMK	10.678	12.500	Paket	3.750.000.000	Siswa baru SMK Negeri se-Kepri
Pemberian Bantuan Seragam SLB	2.128	298	Paket	440.350.200	Siswa Baru SLB Negeri se-Kepri

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau



Gambar 7.3.4 Penyerahan Seragam Sekolah Gratis

5. Bantuan Transportasi Darat dan Laut, Bantuan Diklat, Bantuan Magang/PKL, serta Bantuan makan dan minum peserta didik

Selama tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga telah melaksanakan berbagai kegiatan pemberian bantuan dalam rangka mendukung Peningkatan APS SMA/SMK, sebagai berikut:

Tabel 7.3.54 Jumlah Bantuan Seragam Gratis

Kegiatan	Jumlah	Satuan	Anggaran (Rp.)	Kab/Kota
Bantuan Transportasi Darat Siswa SMA	135	Peserta Didik	281.025.000,00	Bintan, Natuna, Anambas
Bantuan Transportasi Laut Siswa SMA	1.927	Peserta Didik	6.963.825.000,00	7 Kab/Kota
Bantuan Transportasi Laut SMK	457	Peserta Didik	1.100.000.000,00	Anambas, Karimun, Lingga
Bantuan diklat kepelautan/buku pelaut SMK	66	Peserta Didik	396.000.000,00	Tanjungpinang
Bantuan praktek kerja lapangan peserta didik SMK	722	Peserta Didik	400.000.000,00	7 Kab/kota
Bantuan makan dan minum peserta didik SMK di Natuna	151	Peserta Didik	300.000.000,00	Natuna

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau, dalam upaya peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang SMA/SMK sepanjang Tahun 2025 juga ditopang oleh peran aktif Kesetaraan *Gender*. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang berorientasi pada perlindungan hak anak, penguatan ketahanan keluarga, serta pencegahan faktor sosial yang berpotensi menghambat keberlanjutan pendidikan anak usia sekolah menengah.

Melalui kegiatan pencegahan perkawinan anak, penguatan peran keluarga dalam pengasuhan, serta perlindungan terhadap anak berisiko putus sekolah, perangkat daerah ini berkontribusi langsung dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi keberlanjutan pendidikan peserta didik. Upaya tersebut menjadi sangat strategis mengingat faktor sosial, psikologis, dan keluarga merupakan salah satu penyebab utama rendahnya partisipasi sekolah pada kelompok usia 16–18 tahun.

Selain itu, program peningkatan kapasitas keluarga dan pengendalian penduduk turut berperan dalam meningkatkan kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan menengah sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia. Dengan semakin kuatnya dukungan keluarga terhadap keberlanjutan sekolah anak, risiko putus sekolah dapat ditekan secara signifikan.

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK sebagai berikut:



Gambar 7.3.5 Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK

F. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya dengan cara sebagai berikut:



Gambar 7.3.6 Alternatif solusi untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK

G. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Tabel 7.3.55 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Pengelolaan Pendidikan	365.322.687.666,79	302.664.866.696,98	82,85

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	187.656.000,00	153.676.514,00	81,89
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	42.439.000,00	26.028.317,00	61,33
Progran Pengembagan Kurikulum	114.475.500,00	70.519.443,00	61,60
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	786.089.915,00	691.593.745,00	87,98
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.614.930.080,00	1.595.086.742,00	98,77
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	200.000.000,00	179.662.109,00	89,83
Total	**368.268.278.161,79**	**305.381.433.566,98**	**82,92**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp368.268.278.161,79 terealisasi sebesar Rp305.381.433.566,98 atau 82,92%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp62.886.844.594,81 (17,08%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK (88,24%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (82,92%) dengan efesiensi 5,3%.

7.3.5.7. Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

7.3.5.7.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)



Gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Kesetaraan gender (*gender equity*) lebih

dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Indeks Pembangunan *Gender* (IPG) di Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada Tahun 2025 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 94,20 Indeks dari target sebesar 93,57 Indeks dan terealisasi sebesar 100,67%.

Indeks Pembangunan *Gender* (IPG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keseimbangan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPG menunjukkan sejauh mana pembangunan mampu menghadirkan kesempatan dan hasil yang setara bagi kedua gender, sehingga menjadi gambaran penting terkait keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Semakin tinggi nilai IPG, semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, yang menandakan terciptanya lingkungan sosial yang lebih inklusif, adil, dan mendukung pemberdayaan gender dalam berbagai sektor kehidupan.

Untuk menghitung IPG, menggunakan dimensi yang sama dengan Pembangunan manusia yaitu dimensi kesehatan (Angka Harapan Hidup), dimensi pendidikan (Harapan lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah) dan dimensi ekonomi (Pengeluaran Per Kapita) yang dihitung terpisah untuk penduduk perempuan dan laki-laki.

Formula IPG

IPG = (IPM Perempuan / IPM Laki-laki) × 100

Penjelasan Teknis

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kesetaraan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. IPG dihitung dengan membandingkan nilai **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan** terhadap **IPM Laki-laki**, kemudian dikalikan 100.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Meningkatnya kuallitas hidup Perempuan dan Anak dilihat dari Angka Indeks Pembangunan *Gender* (IPG) di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak tahun 2025 masih menggunakan data tahun 2024 baru dikeluarkan oleh BPS pada Agustus 2026. Realisasi indikator Indeks Pembangunan *Gender* (IPG) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 94,20 indeks dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 93,57 Indeks sehingga capaian kinerja sebesar 100,67% atau dalam kategori “Sangat Baik.”

Tabel 7.3.56 Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pembangunan Gender	93,57 Indeks	94,20 Indeks	100,67%

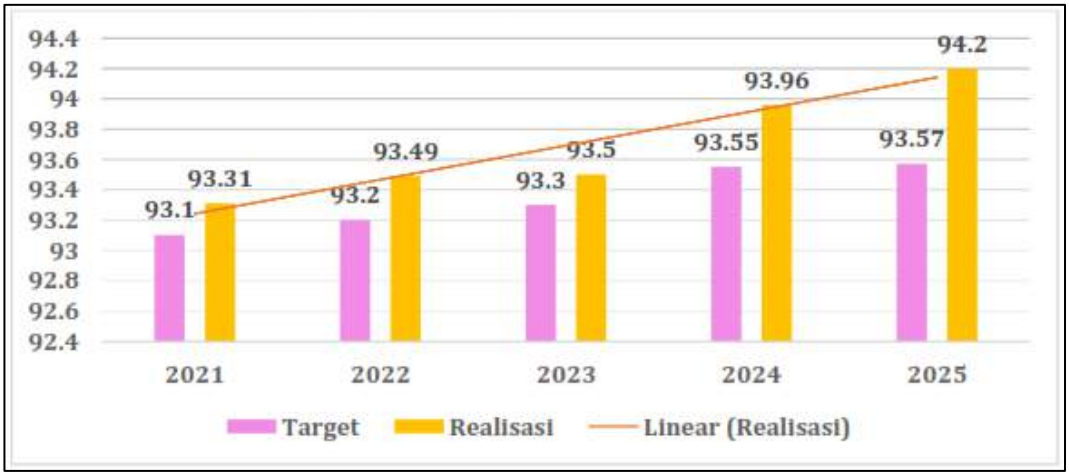
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Perjanjian Kinerja, target Indeks Pembangunan *Gender* (IPG) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebesar 93,57, dengan realisasi 94,20 atau tingkat capaian kinerja 100,67%. Capaian ini menunjukkan kinerja indikator berada pada kategori

melampaui target, yang mengindikasikan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program pengarusutamaan gender dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan *gender* di Provinsi Kepulauan Riau.

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Grafik 7.3.30 Tren Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 – 2025



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Prov. Kepri

Tabel 7.3.57 Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2025

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Capaian IPG				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kepulauan Riau	93,31	93,49	93,5	93,96	94,20
2	Karimun	91,25	91	91,12	91,33	91,61
3	Bintan	93,12	93,53	93,78	93,93	94,05
4	Natuna	91,67	91,95	91,86	92,07	91,82
5	Lingga	89,25	89,73	90,48	90,75	91,12
7	Kep. Anambas	90,27	90,3	91,14	91,25	91,58
8	Batam	94,43	94,51	94,75	94,95	95,72
9	Tanjungpinang	96,79	97,14	97,14	96,96	97,02

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Prov. Kepri

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan *Gender* (IPG) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dan menunjukan tren positif dan bahkan capaian IPG Nasional tahun 2025. Secara data capaian, pertumbuhan IPG Kepri dipimpin oleh Kota Tanjungpinang yang secara konsisten memiliki nilai indeks tertinggi di tingkat provinsi, sementara daerah lain terus melakukan revisi perencanaan untuk mengejar ketertinggalan.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Jika dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kepulauan Riau

tahun 2025 sebesar 94,20, dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 93,60, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Dengan capaian sebesar 100%, kinerja IPG dinilai mendekati target akhir RPJMD.

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Selain gambaran capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tingkat kabupaten/kota dan Provinsi Kepulauan Riau, juga disajikan posisi Provinsi Kepulauan Riau dalam capaian IPG pada tingkat nasional, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 7.3.58 Capaian Kinerja IPG Berdasarkan Provinsi se-Indonesia Tahun 2025

RANGKING	PROVINSI	Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2025
	INDONESIA	91,85
1	DKI JAKARTA	95,56
2	SULAWESI UTARA	95,48
3	SUMATERA BARAT	95,25
4	DI YOGYAKARTA	95,10
5	BALI	95,10
6	**KEPULAUAN RIAU**	**94,20**
7	Nusa Tenggara Timur	93,77
8	Maluku	93,73
9	Sulawesi Selatan	93,53
10	Sumatera Selatan	93,22
11	Jawa Tengah	93,00
12	Sulawesi Tengah	92,89
13	Aceh	92,64
14	Banten	92,52
15	Jawa Timur	92,19
16	Bengkulu	91,65
17	Nusa Tenggara Barat	91,54
18	Sulawesi Tenggara	91,53
19	Sumatera Utara	91,50
20	Lampung	90,93
21	Maluku Utara	90,91
22	Sulawesi Barat	90,60
23	Jawa Barat	90,39
24	Papua	90,30
25	Kep. Bangka Belitung	90,21
26	Kalimantan Selatan	89,94
27	Kalimantan Tengah	89,62
28	Jambi	89,50
29	Riau	89,32

RANGKING	PROVINSI	Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2025
30	Kalimantan Utara	88,77
31	Gorontalo	88,64
32	Kalimantan Barat	88,20
33	Kalimantan Timur	87,45
34	Papua Pegunungan	87,25
35	Papua Barat Daya	84,27
36	Papua Selatan	83,76
37	Papua Barat	82,26
38	Papua Tengah	81,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Capaian IPG Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 94,20 indeks jauh diatas angka capaian Nasional yaitu sebesar 91,85 indeks, kondisi ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat serius dalam memperhatikan kesetaraan gender dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Serta jika di dilhat dari tabel diatas, untuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) berdasarkan Provinsi se-Sumatera, maka Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025 berada pada urutan ke-2. Berikut data lengkap dari seluruh Provinsi se-Sumatera:

Tabel 7.3.59 Capaian Kinerja IPG Berdasarkan Provinsi se-Sumatera Tahun 2025

RANGKING	PROVINSI	Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2025
1	SUMATERA BARAT	95,25
2	**KEPULAUAN RIAU**	**94,20**
3	SUMATERA SELATAN	93,22
4	ACEH	92,64
5	BENGKULU	91,65
6	SUMATERA UTARA	91,50
7	LAMPUNG	90,93
8	KEP. BANGKA BELITUNG	90,21
9	JAMBI	89,50
10	RIAU	89,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

E. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang mendukung ketercapaian dalam mempengaruhi peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Dimensi Kesehatan (Angka Harapan Hidup) antara lain:

a. Angka Harapan Hidup: Perbaikan kualitas layanan kesehatan meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) sehingga derajat Kesehatan dan umur Panjang Perempuan dan laki-laki penduduk Kepri semakin membaik.

b. Sistem Kesehatan Inklusif: Penguatan sistem kesehatan yang lebih responsif dan inklusif menjadi fokus pemerintah untuk mempertahankan tren positif IPG.

2. Penguatan Dimensi Pendidikan (HLS dan RLS) antara lain:

   a. Akses dan Fasilitas: Adanya perbaikan berkelanjutan pada sarana dan prasarana sekolah serta ketersediaan bantuan pendidikan bagi warga kurang mampu untuk jenjang dasar hingga perguruan tinggi.

   b. Indikator Pendidikan: Peningkatan pada Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menjadi motor penggerak indeks pengetahuan.

3. Peningkatan Dimensi Standar Hidup Layak (Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan)

   a. Pelatihan Kemandirian Ekonomi: Menyelenggarakan pelatihan keterampilan praktis seperti tata boga dan menjahit bagi perempuan dalam upaya pemningkatan kualitas keluarga untuk meningkatkan sumbangan pendapatan perempuan dalam ekonomi keluarga dan penyelenggaraan sekolah Perempuan paket C bagi Perempuan kelompok rentan yang putus sekolah.

   b. Penurunan Kemiskinan: Kepulauan Riau menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah se Sumatera dan posisi ke-4 secara nasional, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 117,28 ribu orang (4,44 persen), berkurang 7,7 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2024 yang sebesar 124,96 ribu orang (4,78 persen).

   c. Kolaborasi *Stakeholder* dan Fokus Pembangunan Daerah: Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta (terutama di pusat industri seperti Batam), dan masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja dan stabilitas ekonomi serta kebijakan dalam RKPD 2026 yang lebih tajam dalam menangani isu-isu dasar pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota.

Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan dukungan pada bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana yang memiliki peran strategis dalam mendukung capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang kini berstatus "Sangat Tinggi" di tahun 2025. Kontribusi utama berfokus pada Dimensi Pendidikan (Rata-rata lama Sekolah) dan Dimensi Standar Hidup Layak (Pengeluaran Per Kapita) melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan kegiatan yang dilaksanakan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi keMasyarakatan dengan sasaran penguatan kapasitas bagi organisasi Wanita sebanyak 74 organisasi dengan Lokasi pelaksanaan di Kota Tanjungpinang.

2. Program peningkatan kualitas keluarga dengan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dan mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak dengan sasaran pelatihan dan peningkatan *lifeskill* serta bantuan alat pendukung bagi ibu-ibu rumah tangga berupa pelatihan tata boga dan menjahit sebanyak 610 peserta dengan Lokasi pelaksanaan di Kota Batam.
3. Serta kegiatan untuk mendukung penguatan dimensi Pendidikan yakni Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yakni Sekolah Perempuan bagi kelompok rentan yang putus sekolah dengan lokasi pelaksanaan di Tanjungpinang dan Bintan yang berjumlah 35 Orang peserta remaja putus sekolah, Dimana mereka selain dapat melanjutkan Pendidikan pada paket C dan diberikan pelatihan membatik untuk meningkatkan *lifeskill.*
4. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan untuk menumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya.
5. Melaksanakan pelatihan kewirausahaan berbasis gender untuk mendorong peningkatan kualitas SDM Perempuan dan produktivitas usaha.

Upaya peningkatan kinerja Indeks Pembangunan Gender melibatkan berbagai lintas sektor Selain melalui urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, upaya peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Kepulauan Riau sepanjang Tahun 2025 juga ditopang oleh peran aktif beberapa Perangkat Daerah, antara lain:

1. Pada urusan Pendidikan, upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan IPG, antara lain:
    a. Pemerataan Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan USB, RKB, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan kegiatan pembangunan fisik pendidikan lainnya.
    b. Melanjutkan program Pembebasan SPP, Pemberian Bantuan bagi siswa tidak mampu melalui bantuan transportasi darat dan laut, dan juga bantuan bagi siswa yang melaksanakan magang.
    c. Melakukan koordinasi secara terus menerus baik di internal Dinas Pendidikan, maupun dengan Instansi/lembaga terkait, serta pemerintah pusat dalam rangka mendorong pemenuhan SPM di bidang pendidikan khususnya jenjang menengah.
2. Peran Dinas Kesehatan, upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan IPG, antara lain:
    a. Melaksanakan desiminasi hasil pelaksanaan AMPSR (Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons) di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai bahan pembelajaran agar kasus kematian serupa tidak terjadi lagi dan AMPSR dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

b. Berkolaborasi dengan organisasi profesi seperti IBI, IDAI, dan POGI dalam melakukan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam pemberian pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk pelayanan reproduksi.

c. Melaksanakan bimbingan teknis pelayanan kesehatan ibu dan anak ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan puskesmas.

d. Melakukan *feedback* data program pelayanan kesehatan ibu dan anak secara berkala.

3. Peran Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, upaya yang telah dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka meningkatkan IPG, antara lain:

   a. Tingginya proporsi pelaku UMKM perempuan, khususnya pada sektor perdagangan, kuliner, dan industri rumah tangga;

   b. Proporsi keterlibatan perempuan dalam kepengurusan Koperasi;

   c. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Perempuan sebagai penggerak ekomoni keluarga dengan berkoperasi dan berwirausaha.

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai berikut:

1. Kesenjangan akses pendidikan dimana partisipasi pendidikan perempuan, terutama pada jenjang menengah dan tinggi, masih lebih rendah serta angka putus sekolah perempuan relatif lebih tinggi akibat faktor ekonomi, pernikahan dini dan beberapa permasalahan lainnya yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.;
2. Ketimpangan partisipasi dan akses ekonomi yang berdampak pada Tingkat Partispasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, perempuan banyak bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah dan tanpa perlindungan sosial dan akses perempuan terhadap modal usaha, pelatihan, dan teknologi masih terbatas;
3. Rendahnya pendapatan ekonomi perempuan dilihat dari rendahnya angka rata-rata pengeluaran perkapita perempuan dimana hal ini dikarenakan kurangnya perempuan untuk bekerja pada sektor formal. Hal ini dikarenakan pengeluaran perkapita adalah proksi dari pendapatan atau tingkat kesejahteraan secara ekonomi;
4. Masih banyaknya perempuan yang enggan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas khususnya dibidang ekonomi;
5. Pembinaan dan pendampingan lebih lanjut belum optimal dilakukan terhadap peserta peningkatan kapasitas baik ekonomi maupun sosial karena terkendala dengan lingkup jangkauan dinas;
6. Program kesehatan reproduksi calon pengantin dan *skrining* layak hamil pada Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum berjalan optimal;

7. Koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam program pelayanan kesehatan ibu, anak, serta reproduksi belum optimal;
8. Masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta alat kesehatan di sebagian fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi;
9. Belum optimalnya peran ekonomi perempuan dalam koperasi dan UKM sebagai pengungkit IPG;
10. Kepengurusan dan posisi strategis koperasi masih didominasi laki-laki dan Perempuan sering ditempatkan pada fungsi administratif, bukan pengambil keputusan;
11. Perempuan pelaku UKM masih dominan di skala mikro dengan nilai tambah dan omzet rendah;
12. Kurangnya pemahaman pelaku UKM Perempuan tentang literasi keuangan, manajemen usaha, dan *digital marketing*;
13. Rendahnya dukungan keluarga terhadap perempuan sebagai wirausaha utama.

F. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meninghkatkan pencapaian sasaran kinerja perangkat daerah pada Tahun Anggaran 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan berbagai langkah strategis yang diarahkan pada peningkatan efektivitas pelaksanaan program., kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Upaya-upaya perbaikan kinerja yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor;

   Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui perangkat daerah terkait akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana secara terpadu dan berkelanjutan.

2. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas;

   Perbaikan kinerja akan dilakukan melalui optimalisasi pelaksaan program dan kegiatan yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja perangkat daerah, termasuk peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak serta penguatan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

3. Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan perempuan dan anak;

   Upaya peningkatan kinerja juga akan difokuskan pada penguatan sistem layanan perlindungan perempuan dan anak melalui peningkatan kapasitas lembaga

layanan, penguatan mekanisme penanganan kasus, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan perlindungan.

4. Penguatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);

   Dalam rangka mendorong kesetaraan gender dalam pembangunan daerah, akan dilakukan penguatan implementasi pengarusutamaan gender melalui peningkatan kapasitas daerah, penguatan kelembagaan PUG, serta integrasi perspektif gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

5. Peningkatan efektivitas program pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

   Upaya perbaikan kinerja juga akan dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, penguatan advokasi dan komunikasi informasi edukasi (KIE), serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam program pengendalian penduduk.

   Penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja;

6. Dalam rangka memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan dilakukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian indikator kinerja perangkat daerah.

7. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur;

   Peningkatan kompetensi aparatur melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan teknis kepada pengelola program di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota akan terus dilakukan guna mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Melalui berbagai upaya perbaikan tersebut, diharapkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lebih efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan pencapaian sasaran kinerja perangkat daerah dan dalam mendukung sasaran kinerja kepala daerah dan/atau Nasional serta memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak serta pengendalian penduduk dan keluargaberencana di Provinsi Kepulauan Riau.

G. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Tabel 7.3.60 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	786.089.915,00	691.593.745,00	87,98
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.614.930.080,00	1.595.086.742,00	98,77
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	200.000.000,00	179.662.109,00	89,83
Program Pengelolaan Pendidikan	365.322.687.666,00	302.664.866.696,00	82,85
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	187.656.000,00	153.676.514,00	81,89
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	42.439.000,00	26.028.317,00	61,33

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Progran Pengembagan Kurikulum	114.475.500,00	70.519.443,00	61,60
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	360.265.470,00	337.725.150,00	93,74
Program Pemberdayaan UMKM	17.068.663.172,00	14.573.871.921,00	85,38
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	100.063.100,00	99.200.000,00	99,14
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	2.606.117.098,00	2.279.207.603,00	87,46
Total	**388.403.387.002,00**	**322.671.438.241,00**	**83,08**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp388.403.387.002,00 terealisasi sebesar Rp322.671.438.241,00 atau 83,08%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp65.731.948.761,00 (16,92%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (100,67%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (83,08%) dengan efesiensi 17,59%.

7.3.5.8. Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan

7.3.5.8.1. Tingkat Kemiskinan



Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau menurun. Tingkat Kemiskinan pada Tahun 2025 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 4,44% (menggunakan target tertinggi) dari target sebesar 4,48 – 4,28% dan terealisasi sebesar 101%.

Perlu kami sampaikan bahwa telah dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja, di mana indikator kinerja yang digunakan tetap sama namun mengalami penyesuaian pada penamaan serta target pencapaiannya. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan organisasi, serta peningkatan akurasi dalam pengukuran kinerja. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Pada Indikator ini perjanjian kinerja murni tahun 2025 menjanjikan pencapaian indikator Angka Kemiskinan dengan target 5,63%, kemudian perjanjian kinerja mengalami perubahan dengan indikator Tingkat Kemiskinan dengan target menjadi 4,48-4,28%.

Pada bagian ini, kami akan menyampaikan hasil analisis atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja terbaru sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi. Analisis ini mencakup

tingkat pencapaian setiap indikator, efektivitas pelaksanaan program, serta identifikasi faktor pendukung dan hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai keberhasilan maupun aspek yang masih perlu ditingkatkan, sehingga menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam mencapai target kinerja pada periode berikutnya.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Menurunnya tingkat kemiskinan dilihat dari Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Realisasi indikator Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 4,44% dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 4,48-4,28% (menggunakan target tertinggi) sehingga capaian kinerja sebesar 101% atau dalam kategori "Sangat Baik".

Tabel 7.3.61 Capaian PDRB Per Kapita

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tingkat Kemiskinan	4,48 – 4,28%	4,44%	101%

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Capaian ini mencerminkan perkembangan kondisi sosial-ekonomi yang relatif stabil dan terkendali sepanjang tahun 2025. Realisasi tingkat kemiskinan yang berada di dalam rentang target menunjukkan bahwa berbagai intervensi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan berjalan secara efektif, khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat miskin dan mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin baru.

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Tingkat kemiskinan menunjukkan tren menurun secara konsisten dalam kurun waktu 2020-2025, meskipun sempat mengalami fluktuasi pada masa pandemi. Dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 7.3.31 Tren Penurunan Tingkat Kemiskinan 2020-2025



Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 4,44% dengan target sebesar 3,55-2,26% sehingga capaian kinerja sebesar 74,93%. (perhitungan menggunakan target tertinggi).

Grafik 7.3.32 Perbandingan Realisasi Tingkat Kemiskinan dengan Target RPJMD



Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Pada tahun 2025, Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau mencapai 4,44%, berada jauh di bawah realisasi kemiskinan nasional sebesar 8,47% serta melampaui target nasional pembangunan pada kisaran 7–8%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau sangat baik dan melampaui target nasional, mencerminkan kondisi sosial-ekonomi daerah yang relatif lebih kuat dibandingkan rata-rata nasional. Keberhasilan tersebut didukung oleh struktur ekonomi daerah yang produktif, ketersediaan lapangan kerja, serta efektivitas intervensi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Kedepan, kebijakan penurunan kemiskinan perlu terus diarahkan pada penguatan ketahanan ekonomi masyarakat dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Posisi Provinsi Kepulauan Riau dalam Tingkat Kemiskinan di level nasional, dapat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 7.3.62 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Se-Indonesia Semester I Tahun 2025

NO URUT	PROVINSI	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN SEMESTER 2
1	BALI	3,72
2	KALIMANTAN SELATAN	3,84
3	DKI JAKARTA	4,28
4	KEP. RIAU	4,44
5	KEP. BANGKA BELITUNG	5
…	…	…
37	PAPUA TENGAH	28,9
38	PAPUA PEGUNUNGAN	30,03
	INDONESIA	8,47

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

E. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor Utama Penyebab Penurunan Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Kuat: Ekonomi Kepri mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan mencapai 5,16% pada triwulan I 2025 dan melonjak hingga 7,48% pada triwulan III 2025, menjadikannya yang tertinggi di Sumatera;
2. Penyaluran Bantuan Sosial yang Efektif: Pemberian bantuan pemerintah, termasuk bantuan non- tunai dan jaring pengaman sosial yang terintegrasi dengan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), memberikan dampak signifikan dalam menekan beban pengeluaran masyarakat miskin;
3. Peningkatan Upah Buruh: Rata-rata upah buruh di Kepri tumbuh sebesar 6,73% dalam periode Februari 2024 hingga Februari 2025, yang meningkatkan daya beli masyarakat.

F. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Upaya perbaikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memperbaiki kinerja kedepan dalam mengatasi kemiskinan, sebagai berikut:

1. Penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, melalui peningkatan kualitas bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
2. Melakukan pemutakhiran data masyarakat miskin secara berkala dan Mengintegrasikan sistem informasi antar-instansi;
3. Penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes dengan membentuk *pilot project* BUMDes di setiap kecamatan se-Kabupaten;
4. Memberdayakan masyarakat kelompok rentan melalui pelatihan vokasi, penempatan kerja, kewirausahaan tenaga kerja, serta peningkatan upah dan produktivitas;
5. Menggunakan kanal resmi portal web Kepri dan media sosial untuk menyebarkan info lowongan kerja, pelatihan BLK (Balai Latihan Kerja), dan program beasiswa secara massif dan mengoptimalkan aplikasi SP4N-LAPOR;
6. Pemasangan baru listrik (BPBL) sebanyak 460 unit yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
7. Penguatan Arah Kebijakan Pertanian dengan Penguatan Akses Permodalan Petani, Peningkatan Kualitas SDM Petani, Perlindungan Sosial dan Mitigasi Risiko;
8. Mengembangkan inovasi pemberdayaan perempuan, termasuk pelatihan kewirausahaan dan akses pasar digital;
9. Memperluas cakupan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga miskin, Pemerataan sarana dan Prasana Pendidikan.

G. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

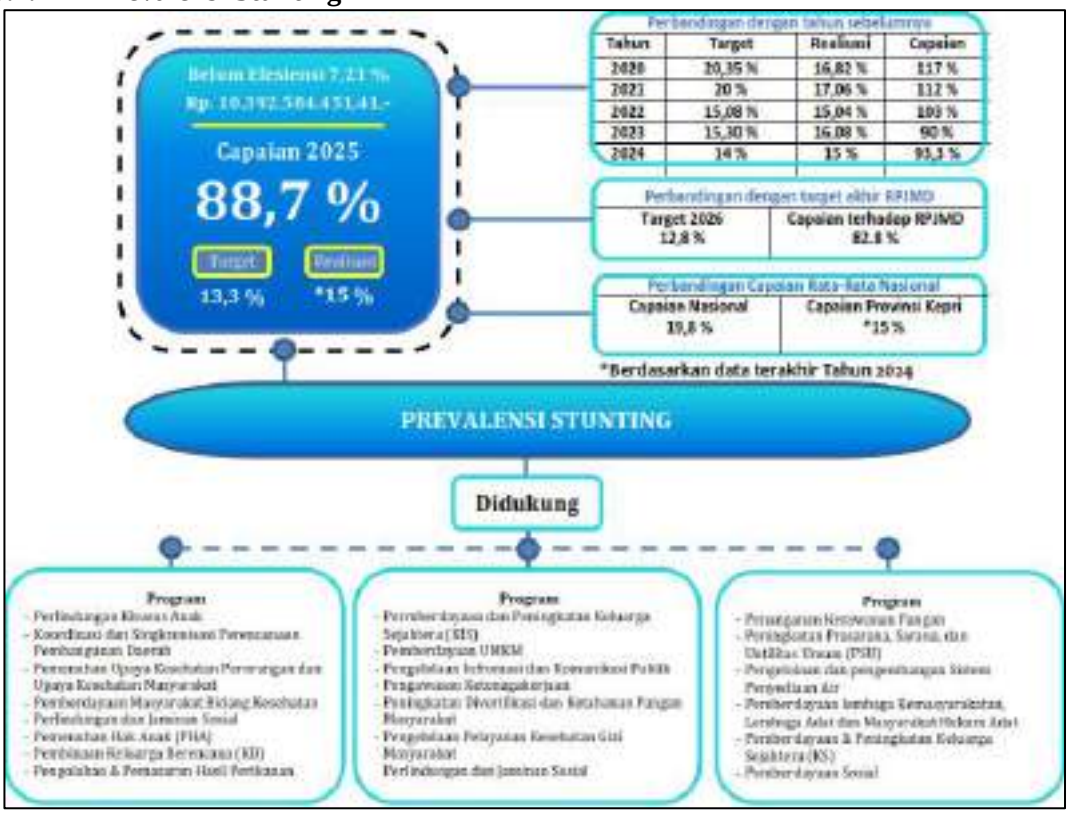
Tabel 7.3.63 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3.757.605.625,00	3.530.534.795,00	94,00
Program Pemberdayaan Sosial	600.895.841,00	596.713.086,00	99,00
Program Pengelolaan Jaminan Masyarakat	26.251.486.888,00	25.214.265.725,00	96,00
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.814.930.080,00	1.774.748.851,00	98,00
Program Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	2.998.500.000,00	2.998.500.000,00	100,00
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	108.979.800,00	104.658.962,00	96,00
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	479.411.260,73	429.088.592,00	90,00
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.347.986.248,00	1.390.236.920,00	26,00
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.267.421.214,00	836.834.500,00	66,00
Program Pemberdayaan UMKM	17.068.663.172,00	14.573.871,92	0,08
Program Pengembangan UMKM	6.300.621.261,00	3.851.740,27	0,08
Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	6.023.866.700,00	5.867.448.582,00	97,00
Program Rilis Berita	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
Program Penyelenggaraan Jalan	49.854.264.462,00	44.032.581.032,00	70,00
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	7.032.813.319,00	6.812.181.216,00	97,00
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	25.899.052.024,00	18.229.179.494,00	70,00
Program Kawasan Permukiman	8.327.386.499,05	8.113.329.014,00	97,00
Total	**163.183.884.393,78**	**119.998.726.381,19**	**73,54**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp163.183.884.393,78 terealisasi sebesar Rp119.998.726.381,19 atau 73,54%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp43.185.158.012,59 (26,46%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Tingkat Kemiskinan (101%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (73,54%) dengan efesiensi 27,46%.

7.3.5.9. Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

7.3.5.9.1. Prevalensi Stunting



Stunting adalah keadaan gagal tumbuh dan kembang, gagal pertumbuhan tinggi badan tidak tercapai sesuai dengan anak seusianya, di mana kecerdasan intelektual dan emosional tidak tercapai dengan ciri-ciri tinggi badan lebih pendek dari seusianya, anak menjadi lebih pendiam dan apatis, tidak banyak melakukan *eye contact*, IQ nya rendah, pertumbuhan melambat tanda pubertasnya juga melambat, wajah tampak lebih muda dari usianya dan pertumbuhan gigi terlambat. Realisasi Prevalensi Stunting pada Tahun 2025 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 15% dari target sebesar 13,3% dan terealisasi sebesar 88,7% .

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan, yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah dari standar usianya. Stunting tidak hanya berpengaruh pada pertumbuhan fisik, tetapi juga dapat menghambat perkembangan kognitif, kemampuan belajar, serta produktivitas di masa depan. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh asupan gizi yang tidak memadai, infeksi berulang, serta pola asuh dan sanitasi yang kurang baik. Reduksi stunting menjadi prioritas pembangunan karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi bangsa.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 7.3.64 Capaian Prevalensi Stunting

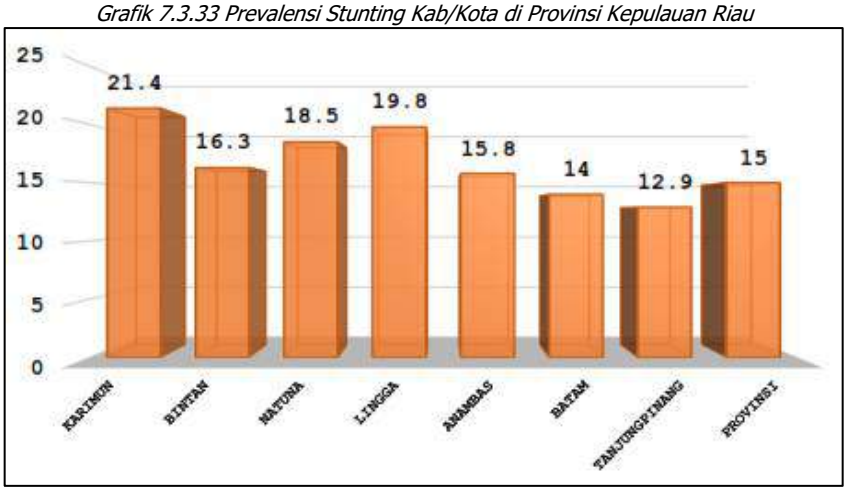
Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prevalensi Stunting	13,3%	15%	88,7%

Sumber : Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari indikator Prevalensi Stunting di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan yang belum maksimal. Realisasi indikator Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 15% dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 13,3% sehingga capaian kinerja sebesar 88,7% atau dalam kategori "Baik".

Data diatas berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia tahun 2024, karena tahun 2025 Pemerintah tidak melakukan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting di Kepulauan Riau sebesar 15%. Apabila dilihat Prevalensi stunting Per Kab/Kota, kabupaten Karimun mengalami permasalahan stunting tertinggi yaitu sebesar 21,4 dan Kota Tanjungpinang menagalami kasus stunting terendah yaitu sebesar 12,9 hal ini terlihat dari grafik berikut:

Grafik 7.3.33 Prevalensi Stunting Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Riau setiap tahunnya mengalami turun dan naik, terlihat dengan perbandingan prevalensi stunting Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2020-2024. Sebagaimana dilihat dari grafik berikut:

Grafik 7.3.34 Target dan Realisasi Prevalensi Stunting Tahun 2020-2025



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan grafik diatas, dalam jangka lima tahun terakhir Realisasi Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan tahun 2023 dan mengalami penurunan pada pada tahun 2024 sebesara 1.8 poin, Namun dilihat dalam tiga tahun terakhir realisasi Prevalensi Stunting berada diatas target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukan kinerja yang belum maksimal dalam penurunan stunting.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Grafik 7.3.35 Perbandingan Realisasi dan Target Akhir RPJMD



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

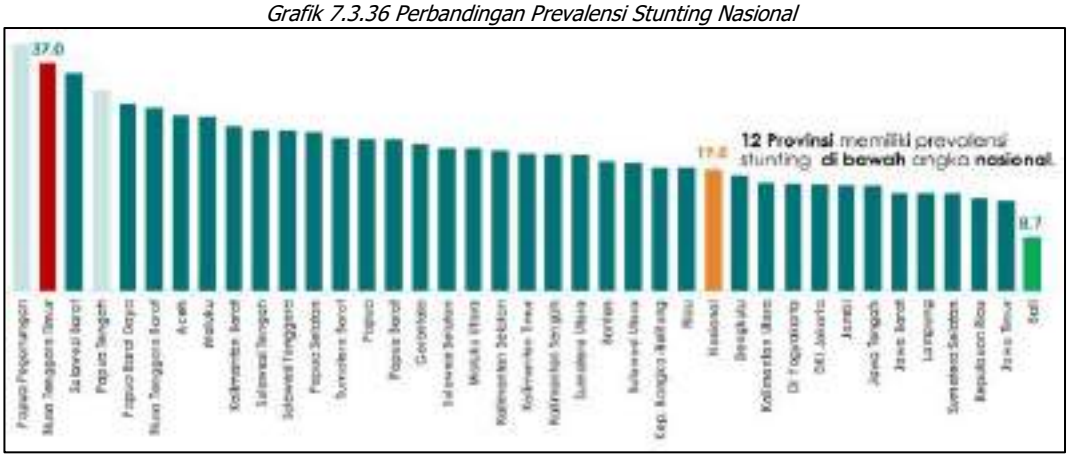
Target prevalensi stunting yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD tahun 2024–2026 dengan target 2026 adalah sebesar 12,8, capaian prevalensi stunting tahun 2025 sebesar 15. Dengan demikian, apabila di bandingkan capaian dengan target tahun 2026 capaian kinerja mencapai 82.8%, yang menunjukkan bahwa target belum sepenuhnya tercapai.

Belum tercapainya target tersebut mengindikasikan bahwa upaya percepatan penurunan stunting masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi capaian antara lain belum optimalnya cakupan dan kualitas intervensi gizi spesifik, seperti pemantauan pertumbuhan belum optimal di tandai dengan meningkatknya balita yang ditimbang tidak naik berat badannya, pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil berisiko, serta pemberian Pemberian Makan Pangan Khusus (PMPK) kepada Balita stunting.

Selain itu, intervensi gizi sensitif yang mendukung penurunan stunting, seperti akses sanitasi layak, ketersediaan air bersih, serta perubahan perilaku masyarakat terkait pola asuh dan konsumsi pangan bergizi, belum berjalan merata di seluruh wilayah. Disparitas antarwilayah dan keterbatasan sumber daya di beberapa daerah turut berkontribusi terhadap belum optimalnya capaian indikator stunting *Bottom of Form.*

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Grafik 7.3.36 Perbandingan Prevalensi Stunting Nasional



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Pada Tahun 2025, capaian prevalensi stunting Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 15%. Apabila dibandingkan dengan target nasional sebesar 18,8% capaian Provinsi Kepulauan Riau sudah sesuai dengan target yang ditentukan dengan capaian kinerja 125,3%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau telah berada sesuai ambang target nasional, yang mengindikasikan kinerja yang sangat baik dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan pelaksanaan berbagai intervensi percepatan penurunan stunting, baik intervensi gizi spesifik maupun gizi sensitif, yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan pertumbuhan balita, pemberian makanan tambahan, serta peningkatan peran lintas sektor menjadi faktor pendukung utama dalam pencapaian tersebut.

Meskipun capaian Provinsi Kepulauan Riau telah melampaui target nasional, upaya penurunan stunting tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan, khususnya untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah dan memastikan keberlanjutan program. Penguatan intervensi pada kelompok sasaran berisiko, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), menjadi kunci untuk menjaga tren penurunan stunting secara konsisten.

Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata nasional, sekaligus menjadi dasar untuk memperkuat komitmen dan strategi dalam mencapai target penurunan stunting yang lebih rendah pada periode selanjutnya.

Stunting disebabkan oleh banyak faktor bukan hanya faktor kesehatan saja melainkan faktor multi sektor. Beberapa penyebab stunting diantaranya adalah praktek pengasuhan yang tidak baik seperti kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, bayi 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI Eksklusif dan Balita tidak mendapatkan MP-ASI yang padat gizi.

E. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis dari beberapa indikator penyebab stunting dilihat dari intervensi SPESIFIK, peningkatan prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Praktek pengasuhan yang tidak baik seperti kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan;
2. Bayi 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI Eksklusif dan Balita tidak mendapatkan MP-ASI yang padat gizi;
3. Terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC (*Ante Natal Care*);
4. Ibu hamil belum patuh dalam mengkonsumsi suplemen zat besi;
5. Menurunnya tingkat kehadiran anak di Posyandu;
6. Kurangnya akses Ibu hamil dan balita ke makanan bergizi seperti makanan bergizi mahal, rendah.
7. Akses Air Bersih & Sanitasi: setiap keluarga miskin belum sepenuhnya memiliki akses air bersih & sanitasi, faktor ini krusial untuk mencegah infeksi penyebab stunting;
8. Kesehatan Ibu & Anak (KIA) & KB: tingkat pertumbuhan anak yang belum mencapai target, mengindikasikan kurangnya cakupan layanan KIA/KB;
9. Peningkatan Ekonomi & Kesejahteraan: Program seperti PKH membantu, namun kemiskinan tetap menjadi akar masalah, ditambah kurangnya pemahaman tentang konsumsi pangan bergizi;
10. Pendidikan & Pengetahuan Ibu: Pendidikan ibu dan pengetahuan tentang gizi seimbang, ASI eksklusif, MPASI dini, serta kebersihan lingkungan, masih menjadi tantangan utama.

Peningkatan Prevalensi Stunting di Provinsi Kepulauan Riau diakibatkan oleh beberapa faktor yang belum mencapai target pada tahun 2025 diantaranya:

1. Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)

   PMT lokal bagi Ibu hamil bertujuan untuk mencapai kenaikan berat badan Ibu hamil sesuai dengan usia kehamilan dan memperbaiki status gizi. Sasaran kegiatan PMT lokal adalah Ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan Ibu hamil risiko KEK. Pelaksanaan PMT lokal bagi Ibu hamil dimulai dengan kegiatan deteksi dini dan penemuan kasus melalui Antenatal (ANC) terpadu, tata laksana dan rujukan.

Grafik 7.3.37 Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan data sigizikesga bulan november tahun 2025 terdapat 4,72% ibu hamil KEK di Provinsi Kepulauan Riau, prevalensi tertinggi di Kabupaten Anambas 33,3%. Target ibu hamil KEK mendapatkan PMT tahun 2025 di Provinsi Kepulauan Riau adalah 84%, berdasarkan data di atas capaian bumil KEK dapat PMT di Provinsi Kepulauan Riau adalah 60,37% dan ada data outlier yaitu Kabupaten Lingga melebihi 100%.

Dari 7 Kabupaten/Kota terdapat belum ada yang mencapai target, beberapa penyebab tidak mencapai target adalah:

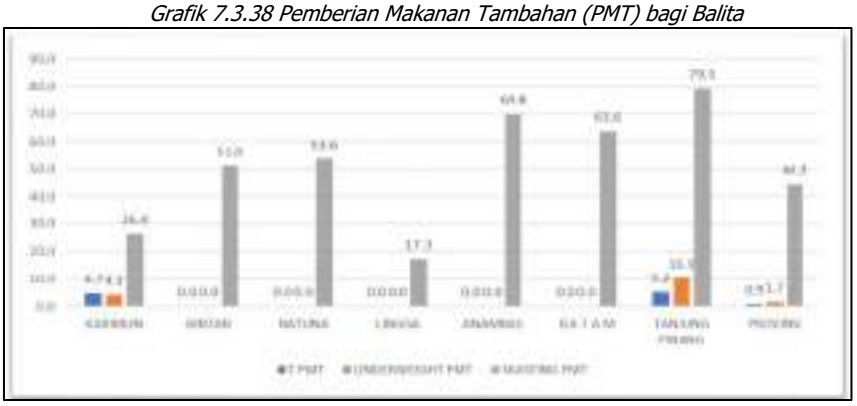
a. Bumil KEK ada yang menolak dengan alasan bosan dan tidak dapat menerima menu yang di sediakan karena masih mual;
b. Keterbatasan alat dan bahan dalam pembuatan PMT;
c. Petugas belum memahami mengenai pencatatan dan pelaporan;
d. Dana BOK untuk pengadaan PMT baru dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun, sedangkan kasus bumil KEK terdapat sepanjang tahun;
e. Terdapat Puskesmas yang tidak dapat memenuhi persyaratan sehingga tidak mendapatkan dana BOK;
f. Lokasi desa/kelurahan yang jauh dari Puskesmas induk dan tidak dapat di capai dengan jalan darat sehingga di daerah tersebut tidak dilakukan kegiatan PMT Bumil KEK;
g. Kekurangan SDM khususnya nutrisionis di Puskesmas;
h. *Drop Out* sasaran bumil KEK serta mobilitas yang tinggi.

2. Tatalaksana Balita dengan Masalah Gizi

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita bertujuan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi Balita melalui pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sasaran penerima makanan tambahan berbahan pangan lokal adalah Balita gizi kurang (*wasting*) baik dengan atau tanpa stunting, Balita berat badan kurang

(*underweight*), dan Balita tidak naik berat badan (T) untuk mencegah Balita mengalami masalah gizi yang lebih berat

Grafik 7.3.38 Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan data di atas didapatkan balita T yang dapat PMT sebesar 0,9%, *underweight* mendapat PMT sebesar 1,7% dan wasting mendapat PMT sebesar 44,3%. Capaian ini masih jauh dari target yang ditentukan yaitu 65%. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain ketidaktepatan sasaran, yang disebabkan oleh perubahan data balita berisiko gizi serta belum sepenuhnya sinkronnya data antara posyandu, puskesmas, dan sistem pelaporan. Kondisi ini berpengaruh pada penentuan jumlah dan lokasi sasaran PMT Balita. Selain itu, kepatuhan konsumsi PMT oleh balita sasaran masih belum optimal. Beberapa balita tidak mengonsumsi PMT sesuai ketentuan, baik karena preferensi rasa, pola asuh keluarga, maupun kurangnya pemahaman orang tua tentang manfaat PMT dalam perbaikan status gizi.

Permasalahan lain adalah kendala distribusi dan ketersediaan PMT, khususnya di wilayah dengan akses geografis terbatas. Keterlambatan pengadaan dan distribusi menyebabkan waktu pemberian PMT tidak sesuai jadwal, sehingga berdampak pada efektivitas intervensi. Dari sisi pelaksanaan, masih ditemukan keterbatasan sumber daya, baik tenaga gizi maupun kader pendamping, serta belum optimalnya pemantauan dan evaluasi konsumsi PMT di tingkat lapangan. Edukasi dan pendampingan kepada keluarga sasaran juga belum dilakukan secara merata dan berkelanjutan.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar perlunya perbaikan strategi pelaksanaan PMT Balita kedepan, melalui penguatan validasi data sasaran, peningkatan kualitas pendampingan dan edukasi gizi, serta perbaikan sistem distribusi dan pemantauan agar PMT Balita dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap penurunan stunting.

Kendala lainnya yang di hadapi dalam penanganan stunting adalah : tenaga gizi terbatas, penimbangan balita masih rendah sehingga belum bisa menjangkau cakupan seluruh sasaran balita, alat antropometri di Posyandu belum semua terstandar, masih terdapat Pengukuran BB dan TB yang dilakukan oleh kader yang belum terorientasi pemantauan pertumbuhan.

Dalam rangka mendukung pencapaian Kinerja penurunan Prevalensi Stunting, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan upaya-upaya spesifik dalam menangani permasalahan dan pencegahan stunting diantaranya :

1. Melakukan kegiatan GERCEP ANTING (Gerakan Cepat Pananganan Stunting) yaitu memberikan bantuan kepada keluarga Balita stunting di wilayah Kabupaten Lingga dan Kabupaten Karimun. Tujuan dari pemberian bantuan adalah untuk meningkatkan asupan zat gizi pada Balita stunting yang dikarenakan keterbatasan ekonomi,pola asuh dan budaya. Adapun paket GERCEP ANTING yang diberikan berjumlah 400 paket yang diserahkan kepada 200 balita stunting di Kabupaten Karimun dan 200 balita stunting di Kabupaten Lingga;
2. Pengadaan Antropometri Kit dalam rangka pemantauan pertumbuhan yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan alat ukur antropometri yang standar, akurat, dan memadai untuk mendukung pemantauan pertumbuhan dan penilaian status gizi bayi, balita, anak, dan ibu hamil. Lokasi pemberian bantuan ini adalah di 10 Puskesmas di Kabupaten Bintan yaitu Puskesmas Tanjung Uban, Puskesmas Tambelan, Puskesmas Mantang, Puskesmas Kelong, Puskesmas Kawal, Puskesmas Teluk Bintan, Puskesmas Teluk Sasah, Puskesmas Kijang, Puskesmas Toapaya dan Puskesmas Sri Bintan;
3. Pengadaan Hb meter bagi remaja putri yang digunakan untuk pemeriksaan kadar hemoglobin sebagai upaya deteksi dini dan penanggulangan anemia pada remaja putri. Paket HB meter ini di peruntukkan bagi remaja putri di Kota Batam dan Kabupaten Bintan dengan total 20 paket;
4. Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) stunting berupa alat SDIDTK (Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang) dan Konseling menyusui kit berjumlah 110 paket dengan lokus Kabupaten Bintan;
5. Memberikan bantuan paket pencegahan resiko stunting kepada Balita beresiko stunting dengan ekonomi yang lemah. Tujuan dari pemberian bantuan adalah untuk meningkatkan asupan zat gizi pada Balita resiko stunting (Balita T) yang dikarenakan keterbatasan ekonomi, pola asuh dan budaya. Pemberian ini akan diberikan kepada 767 balita resiko stunting selama dua siklus pemberian dimana dalam satu siklus pemberian selama 14 hari, sehingga total pemberian 28 hari.

Upaya-upaya spesifik dalam menangani permasalahan dan pencegahan stunting yang dilaksanakan di Puskesmas dan Kabupaten/Kota diantaranya :

1. Pemberian bantuan F100 bagi balita kasus gizi buruk;
2. Pelacakan kasus gizi buruk dan gizi kurang bagi balita yang tidak datang ke Posyandu melalui sweeping;
3. Pemberian Makanan Tambahan Pangan Lokal lepada Balita bermasalah gizi dan Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Kronis);
4. Perawatan kasus gizi buruk di Puskesmas dan Rujukan ke Rumah Sakit serta Pemantauan kasus gizi buruk pasca perawatan (Follow up);
5. Konseling pada keluarga melalui kunjungan rumah;

6. Program 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) berupa pemberian tablet Fe (zat besi) pada Ibu Hamil, IMD, ASI Ekslusif, MP-ASI;
7. Pemberian tablet Fe kapada Remaja putri dengan konsumsi 1 tablet perminggu sepanjang tahun;
8. Konseling pra nikah kepada calon pengantin dengan bekerjasama dengan KUA;
9. Integrasi program KIA – Gizi melalui Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita;
10. Sosialisasi Gerakan AKSI BERGIZI di sekolah melalui media massa dan elektronik;
11. Pemberian Suplemen Taburia pada balita stunting;
12. Pengadaan Antropometri Kit Dalam Rangka Pemantauan Pertumbuhan.

F. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Kedepannya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga akan terus mengupayakan agar upaya preventif dalam pencegahan stunting dikedepankan melalui :

1. Perbaikan status gizi remaja putri, calon ibu, ibu hamil dan Balita sehingga semakin dini stunting dideteksi maka penanganan akan semakin mudah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membutuhkan dukungan seluruh pihak untuk keberhasilan dalam pencapaian intervensi pencegahan dan penurunan stunting diantaranya sebagai berikut:
    a. Setiap ibu hamil sebelum usia kehamilan 3 bulan harus sudah periksa ANC agar bisa mencapai standar ANC 6x;
    b. Setiap ibu hamil minum Tablet Tambah Darah (TTD/MMS – Multivitamin Ibu Hamil) setiap hari selama kehamilan;
    c. Setiap Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) mendapatkan Makanan Tambahan Lokal selama 120 hari;
    d. Setiap ibu menyusui mendapatkan dukungan untuk bebas menyusui bayinya kapanpun;
    e. Setiap ibu menyusui yang bekerja mendapat fasilitas ruangan untuk memerah ASI di tempat kerja;
    f. Ada pengawasan terhadap bantuan produk pengganti ASI, hanya dapat diberikan atas petunjuk dokter;
    g. Setiap bayi lahir di fasilitas kesehatan;
    h. Setiap bayi harus mendapatkan ASI saja selama 6 bulan;
    i. Setiap bayi usia 6 bulan harus mulai diberi makanan padat kaya protein hewani (MP-ASI) dan ASI dilanjutkan sampai usia 2 tahun;
    j. Setiap balita harus ditimbang sebulan sekali di Posyandu;
    k. Setiap balita Berat Badan Tidak Naik (T) harus mendapat Makanan Tambahan Lokal selama 2 minggu;

l. Setiap balita Berat Badan Kurang mendapat Makanan Tambahan Lokal selama 4 minggu;

m. Setiap balita Gizi Kurang mendapat Makanan Tambahan Lokal selama 8 minggu;

n. Setiap balita Gizi Buruk mendapat tata laksana;

o. Setiap baduta mendapat imunisasi lengkap;

p. Setiap remaja putri kelas 7 dan kelas 10 di skrining anemia;

q. Setiap remaja putri anemia mendapat tata laksana;

r. Setiap remaja putri minum TTD satu tablet setiap minggu;

2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga berupaya melalui berbagai kegiatan yang bersifat preventif dan pemantauan pelaksanaan monitoring E-HDW, melalui peningkatan kader Pembangunan Manusia (KPM) di Desa serta melakukan validasi data setiap bulan melibatkan lintas program dan lintas sektor.

3. Penguatan Peran Kader (TPK & PKK) dengan melakukan peningkatan kapasitas kader lapangan untuk melakukan edukasi intensif mengenai 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Tujuannya adalah memastikan keluarga sasaran mendapatkan pendampingan secara maksmimal pada tahun 2026 serta melibatkan tokoh masyarakat sehingga lebih banyak balita yang datang ke posyandu, revitalisasi posyandu melalui orientasi kader dan peningkatan sarana prasarana posyandu sepertu pengadaan antropometri kit.

4. Upaya perbaikan utama yang akan dilakukan meliputi penajaman sasaran keluarga berisiko stunting melalui penguatan pemutakhiran dan integrasi data kesejahteraan sosial dengan data sektoral stunting, sehingga intervensi sosial dapat lebih tepat sasaran dan akuntabel.

5. Penguatan kualitas program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui peningkatan pendampingan usaha, penguatan keterampilan kewirausahaan, serta perluasan akses pasar, guna meningkatkan keberlanjutan ekonomi keluarga dan mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak secara berkelanjutan.

6. Perluasan jangkauan sosialisasi hingga seluruh kabupaten/kota dan pulau-pulau kecil, peningkatan ketersediaan ikan dan produk olahan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha, penguatan pembinaan diversifikasi produk melalui pelatihan dan pendampingan teknis, dukungan berkelanjutan untuk perubahan perilaku konsumsi melalui integrasi program gizi dan edukasi masyarakat, serta monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas program dan perbaikan strategi ke depan.

G. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

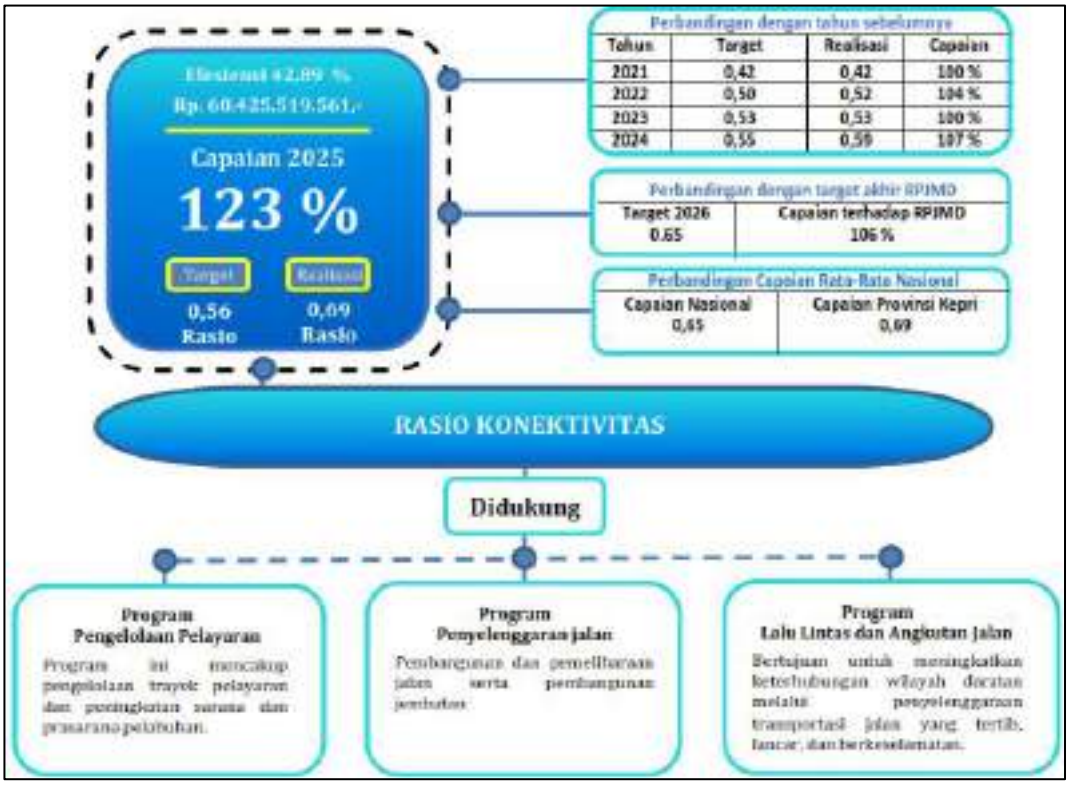
Tabel 7.3.65 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	557.722.000,00	555.176.670,00	99,54
Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	346.494.600,00	233.391.301,00	67,36
Program Perlindungan Khusus Anak	50.692.000,00	49.688.942,00	98,02
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.008.010.000,00	4.007.400.000,00	99,98
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	200.000.000,00	182.382.860,00	91,19
	81.756.330,00	75.341.590,00	92,15
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3.757.605.625,00	3.530.534.795,00	93,96
Program Pemberdayaan Sosial	600.895.841,00	596.713.086,00	99,30
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	479.411.260,73	429.088.592,00	89,50
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	69.996.794,68	67.627.507,00	96,62
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	240.000.000,00	239.750.000,00	99,90
Total	**10.392.584.451,41**	**9.967.095.343,00**	**95,91**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp10.392.584.451,41 terealisasi sebesar Rp9.967.095.343,00 atau 95,91%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp425.489.108,41 (4,09%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Prevalensi Stunting (88,7%) lebih rendah dari realisasi anggaran (95,91%) sehingga belum efesiensi 7,21%.

7.3.5.10. Sasaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau

7.3.5.10.1. Rasio Konektivitas



Rasio Konektivitas merupakan suatu komponen karakteristik suatu grafik yang mengekpresikan tingkat interaksi antar titik atau jumlah busur yang terjadi dalam suatu grafik. Dapat diartikan juga sebagai gabungan indikator kinerja angkutan darat, angkutan sungai danau penyeberangan (ASDP) dan angkutan laut pada provinsi. Rasio Konektivitas di Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Rasio Konektivitas pada Tahun 2025 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 0,69 Rasio dari target sebesar 0,56 Rasio dan terealisasi sebesar 123%.

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Antar pulau dengan indikator Rasio Konektivitas, Indikator Rasio Konektivitas terbagi menjadi 2 indikator yaitu Rasio Konektivitas Angkutan Darat dan Rasio Konektivitas Angkutan Laut, dalam Rasio Konektivitas Angkutan Darat terdapat dua (Angkutan Perkotaan dan AKDP) sedangkan untuk Rasio Konektivitas Angkutan Laut terdapat angkutan sungai danau penyeberangan (ASDP) pada provinsi dan angkutan laut. Berikut ini adalah data jumlah layanan trayek angkutan darat (Angkutan Perkotaan dan AKDP), Lintas angkutan sungai danau penyeberangan (ASDP) pada provinsi dan jumlah trayek angkutan laut.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Percepatan pembangunan infrastruktur dan pengintegrasian antar pulau dapat dilihat dari indikator Rasio Konektivitas di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan

penurunan yang cukup menggembirakan. Realisasi indikator Rasio Konektivitas Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 0,69 Rasio dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 0,56 Rasio, sehingga capaian kinerja sebesar 123% atau dalam kategori "Sangat Baik".

Tabel 7.3.66 Capaian Rasio Konektivitas

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rasio Konektivitas	0,56 Rasio	0,69 Rasio	123%

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Rasio Konektivitas Provinsi merupakan indikator kinerja utama yang menggambarkan tingkat keterhubungan jaringan transportasi antarwilayah di Provinsi Kepulauan Riau, baik melalui moda transportasi darat maupun perairan. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah simpul dan jaringan pelayanan transportasi yang berfungsi dengan kebutuhan konektivitas wilayah, serta mencerminkan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberfungsian layanan angkutan dalam mendukung mobilitas orang dan distribusi barang antar pulau.

Trayek angkutan darat merupakan bagian dari sistem jaringan transportasi jalan yang berfungsi sebagai penghubung antar pusat kegiatan, kawasan permukiman, dan simpul transportasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Penyajian data trayek angkutan darat berikut dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi eksisting jaringan pelayanan angkutan dalam mendukung capaian Rasio Konektivitas Angkutan Darat.

Tabel 7.3.67 Data Trayek Angkutan Darat dalam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Trayek Angkutan Darat
1	Tanjungpinang – Tanjung Uban (Kab. Bintan)
2	Tanjung Uban (Kab. Bintan) - Tanjungpinang
3	Tanjungpinang – Berakit (Kab. Bintan)
4	Berakit (Kab. Bintan) - Tanjungpinang
5	Tanjungpinang – Kijang (Kab. Bintan)
6	Kijang (Kab. Bintan) - Tanjungpinang
Lintasan Angkutan Darat : 6 Lintasan	

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) merupakan komponen penting dalam sistem transportasi di Provinsi Kepulauan Riau yang berciri kepulauan dan sangat bergantung pada moda transportasi perairan. Penyelenggaraan lintasan ASDP berperan strategis dalam menghubungkan antar pulau, kawasan permukiman, pusat kegiatan ekonomi, serta simpul transportasi lainnya. Penyajian data lintasan ASDP berikut dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi eksisting jaringan pelayanan penyeberangan dalam mendukung capaian Rasio Konektivitas Angkutan Perairan.

Tabel 7.3.68 Data Lintasan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Lintas Penyeberangan
1	Tanjung Balai Karimun - Sei. Selari
2	Telaga Punggur - Sei Selari

No	Lintas Penyeberangan
3	Telaga Punggur - Kuala Tungkal
4	Dabo - Kuala Tungkal
5	Serasan - Sintete
6	Tambelan - Sintete
7	Tanjung Balai Karimun - Selat Beliah
8	Tanjung Uban - Tambelan
9	Dabo - Penarik
10	Midai - Penagi
11	Penagi - Subi
12	Subi - Serasan
13	Telaga Punggur - Tanjung Uban
14	Telaga Punggur - Tanjung Balai Karimun
15	Telaga Punggur - Dabo
16	Tanjung Pinang - Tanjung Balai Karimun
17	Tanjung Pinang - Dabo
18	Tanjung Uban - Matak
19	Matak - Midai
20	Tanjung Uban - Letung
21	Tanjung Uban - Sedanau
Lintasan Angkutan penyeberangan : 21 x 50% = 10,5 Lintasan Penyeberangan	

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Angkutan laut merupakan tulang punggung sistem transportasi di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dan keterpisahan antar pulau. Penyelenggaraan lintasan angkutan laut berperan strategis dalam menghubungkan antar pulau, pusat pertumbuhan, kawasan permukiman, serta simpul transportasi laut. Penyajian data lintasan angkutan laut berikut bertujuan untuk menggambarkan kondisi eksisting jaringan pelayanan angkutan laut dalam mendukung kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang, sekaligus meningkatkan capaian Rasio Konektivitas Angkutan Laut.

Tabel 7.3.69 Data Lintasan Angkutan Laut Provinsi

No	Lintas	Armada
1	Tanjung Pinang - 132 - Jagoh/Dabo - 80 - P. Pekajang - 42 - Belinyu - 42 - P. Pekajang - 80 - Jagoh/Dabo - 132 - Tanjung Pinang - 205 – Tambelan - 131 - Midai - 50 - Selat Lampa - 71 - P. Laut - 35 - Seluan - 34 - Selat Lampa - 65 - Subi - 35 - Pulau Panjang - 20 - Serasan - 92 - Sintete - 95 – Tambelan - 227 - Batam - 25 - Tanjung Pinang	Trayek R-7 11 Lintasan
2	Kijang - 185 - Tambelan - 125 - Pontianak - 178 - Serasan - 52 - Subi - 65 - Selat Lampa - 71 - P. Laut - 66 - Sedanau - 56 - Midai - 112 - Tarempa - 37 - Kuala Maras - 162 - Kijang - 72 - Pelabuhan Sungai Guntung - 89 - Tembilahan - 89 - Pelabuhan Sungai Guntung - 72 - Kijang	Trayek R-8 10 Lintasan
3	Sintete - 92 - Serasan - 52 - Subi - 68 - Ranai/Penagi - 64 - P. Laut - 66 - Sedanau - 56 - Midai - 112 - Tarempa - 46 - Letung - 176 - Tanjung Pinang – 205 - Tambelan - 95 - Sintete	Trayek R-9 10 Lintasan
4	Tanjung Priok - 484 - Kota Segara/Tanjung Uban - 147 - Letung - 36 - Tarempa - 12 - Selat Lampa - 61 - Subi - 47 - Serasan - 85 - Midai - 245 - Kota Segara/Tanjung Uban - 484 - Tanjung Priok	T2 Trayek Tol Laut 6 Lintasan
Lintasan Angkutan Laut : 37 x 50%= 18,5 Lintasan Angkutan Laut		

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Dari data tersebut diatas dapat diuraikan perhitungan capaian rasio konektivitas provinsi sebagai berikut:

Tabel 7.3.70 Perhitungan Capaian Rasio Konektivitas Provinsi Kepulauan Riau

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio konektivitas
Rumus	:	Rasio konektivitas = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) ● IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut) ● IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) : ● Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKDP ● Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKDP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) : ● Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil ● Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan atau: 1) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas : 1) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 2) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 3) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5

Tabel 7.3.71 Perhitungan IK1 Rasio Konektivitas Angkutan Darat Tahun 2025

(Jumlah trayek yang dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi)	(IK1 x bobot angkutan jalan)	Persentase Akhir IK1
IK1 = $\frac{6 \times 1}{6}$ = 100 X 30% =		0,30 rasio

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 7.3.72 Perhitungan IK2 Rasio Konektivitas Angkutan Perairan Tahun 2025

(Jumlah lintasan angkutan perairan yang beroperasi pada provinsi x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyebrangan pada provinsi)						(121 x bobot angkutan Perairan)		Persentase Akhir IK2
IK1	=	$\frac{29 \times 1}{52}$		0,56	X	70%	=	0,39 rasio

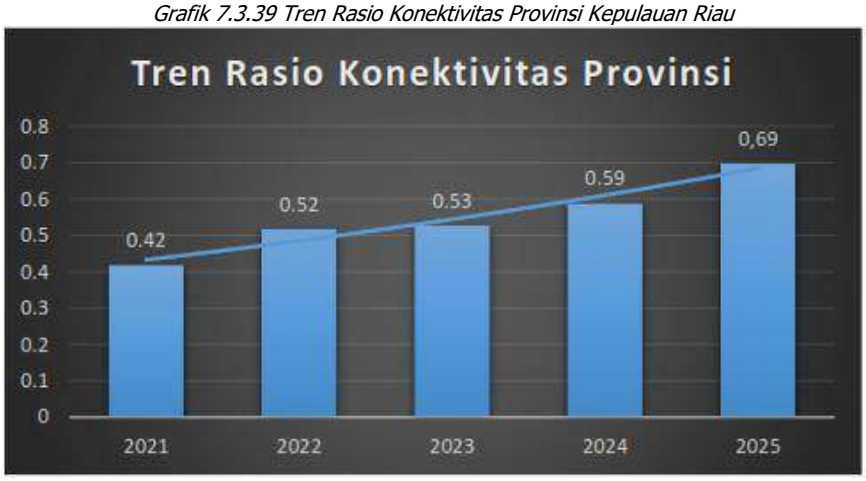
Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Sehingga Capaian Rasio Konektivitas = (IK1 + IK2) = 0,30 + 0,39 = 0,69

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja peningkatan Rasio Konektivitas tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,10 Rasio. Dimana pada tahun 2024 Rasio Konektivitas sebesar 0,59 rasio meningkat menjadi 0,69 rasio pada tahun 2025.

Grafik 7.3.39 Tren Rasio Konektivitas Provinsi Kepulauan Riau



Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2026 realisasi kinerja Rasio Konektivitas Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 0,69 Rasio dengan target sebesar 0,65 Rasio sehingga capaian kinerja sebesar 106%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Perhubungan dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, khususnya pada wilayah kepulauan, telah melebihi target perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Grafik 7.3.40 Perbandingan Capaian Rasio Konektivitas Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD



Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Berdasarkan perbandingan dengan capaian rata-rata nasional, Rasio Konektivitas secara nasional tercatat sebesar 0,65, sementara capaian rata-rata Rasio Konektivitas Provinsi Kepulauan Riau berada pada angka 0,69. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian Provinsi Kepulauan Riau masih berada di atas rata-rata nasional. Konektivitas yang dipengaruhi oleh karakteristik wilayah Kepulauan Riau sebagai daerah kepulauan dengan sebaran pulau yang luas dan tidak merata, sehingga membutuhkan upaya dan sumber daya yang lebih besar dalam penyediaan serta pemeliharaan infrastruktur transportasi. Capaian Rasio Konektivitas Provinsi Kepulauan Riau tetap menunjukkan progres positif dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang menekankan peningkatan konektivitas wilayah tertinggal, terluar, dan kepulauan.

E. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan meliputi pengembangan dan penataan jaringan transportasi laut, darat, serta sungai, danau, dan penyeberangan (SDP) sebagai tulang punggung konektivitas wilayah kepulauan. Dinas Perhubungan secara berkelanjutan melakukan fasilitasi pembukaan dan pengoperasian trayek angkutan laut dan penyeberangan, guna menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan wilayah hinterland dan pulau-pulau terluar.

Selain itu, Dinas Perhubungan juga melakukan peningkatan kualitas pelayanan transportasi melalui pemeliharaan dan peningkatan fasilitas pelabuhan, dermaga, serta prasarana pendukung keselamatan angkutan darat. Upaya ini ditujukan untuk memastikan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan transportasi yang aman, andal, dan berkelanjutan, sehingga mendukung kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang antarwilayah.

Dalam aspek perencanaan dan koordinasi, Dinas Perhubungan memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga terkait, serta pemangku kepentingan transportasi lainnya. Koordinasi ini dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan

pengembangan jaringan transportasi daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dan sumber daya yang tersedia.

Faktor yang mendukung ketercapaian peningkatan rasio konektivitas di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 antara lain adalah:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatannya:

   a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

      Melalui kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau memastikan tersedianya sarana perlengkapan jalan sesuai standar teknis pada ruas-ruas jalan provinsi. Ketersediaan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta fasilitas keselamatan lainnya berperan dalam meningkatkan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas, sehingga mendukung keandalan jaringan jalan sebagai penghubung antar pusat kegiatan wilayah. Berikut dapat disampaikan beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan antara lain:

      1) Pemasangan marka Jalan, Pita Penggaduh di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga.

      2) Pemasangan Jalur Sepeda dan Rambu Lalu Lintas di Kota Tanjungpinang.

      Selain dari kegiatan tersebut di atas, Dinas Perhubungan juga telah melakukan koordinasi antar stakeholder pemangku kepentingan di jalan raya, baik dengan Direktorat/Satuan Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, Dinas PUPR, BPTD Kepri terkait pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui Forum Komunikasi Lalu Lintas maupun secara random terhadap suatu kegiatan yang memerlukan tindakan penanganan cepat atas kondisi jalan/lalu lintas.

   b. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

   c. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

2. Peningkatan Kualitas Jalan dan Pembangunan Infrastruktur Jembatan

Tabel 7.3.73 Peningkatan, Pemeliharaan Jalan Dan Pembangunan Jembatan

No	Paket Kegiatan	Satuan	Panjang Penanganan
1	Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun	Km	0,3454
2	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan	Km	0,13
3	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Karimun	Km	0,148
4	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Lingga	Km	0,075
5	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas	Km	0,225
6	Pemeliharaan berkala jalan sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, kab. Karimun (DBH Sawit provinsi Kepri Lanjutan)	Km	0,265

No	Paket Kegiatan	Satuan	Panjang Penanganan
7	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan	Km	0,6877
8	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Kota Tanjungpinang	Km	1,004
9	Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang	Km	0,0242
10	Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga	Km	0,261
11	Pembangunan Jembatan Semala, Kabupaten Natuna	Jembatan	1

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Prov. Kepri

Upaya lainnya, yang mendukung ketercapaian peningkatan rasio konektivitas di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah Program Pengelolaan Pelayaran, dengan kegiatanya:

1. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi.
2. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional.
3. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan.
4. Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas.
5. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.

   Pembangunan serta penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional merupakan upaya strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan keterpaduan jaringan transportasi laut dan memperkuat sistem konektivitas wilayah kepulauan. Pelabuhan pengumpan regional berfungsi sebagai simpul penghubung antara pelabuhan lokal, pelabuhan pengumpan, dan pelabuhan utama, sehingga memperlancar pergerakan orang dan barang antarwilayah di dalam provinsi.

Berikut disampaikan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian indikator sektor perhubungan “Rasio Konektivitas” .

1. Keterbatasan Infrastruktur Transportasi Secara geografis wilayah Kepulauan Riau terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar diseluruh wilayah yang sebagian besar merupakan perairan, kondisi geografis ini menyebabkan terbatasnya akses darat yang dapat dijangkau, hampir seluruh wilayah menggunakan akses transportasi laut. Untuk meningkatkan konektivitas antar

wilayah ini diperlukan infrastruktur yang memadai sebagai sarana dan prasana moda transportasi. Kebutuhan akan infrastruktur transportasi ini merupakan alasan utama pendukung tercapainya konektivitas, akan tetapi disebagian besar wilayah Kepulauan Riau masih minim ketersedian infrastruktur transportasi seperti kurangnya ketersediaan pelabuhan di pulau-pulau yang berpenghuni dan kurangnya moda transportasi yang laut yang melayani.

2. Kualitas Material dan Pelaksanaan: Penggunaan material yang berkualitas rendah dan pelaksanaan yang tidak sesuai standar dapat mengakibatkan jalan cepat rusak.

F. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan indikator rasio konektivitas dan mengurangi permasalahan dan kedala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya:

1. Mengadakan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam hal keterhubungan wilayah atau konektivitas antar wilayah, agar terjadi sinkronisasi dan keselarasan yang baik dalam perencanaan bidang transportasi sehingga secara tidak langsung berpengaruh pada peningkatan konektivitas wilayah provinsi.
2. Memprioritaskan kegiatan yang menjadi pendukung peningkatan konektivitas provinsi yang akan direncanakan akan membangun pelabuhan pada Kabupaten Natuna yaitu Pelabuhan Selat Lampa dan Pelabuhan Matak Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalan hal Kerjasama layanan trayek transportasi dengan meminta dukungan moda transportasi dan sarana prasarana transportasi.
4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalan hal pengembangan lintasan trayek yang melayani daerah 3T (terluar, terdepan dan tertinggal) untuk meningkatkan konektivitas dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.
5. Peningkatan Kualitas Infrastruktur: Menggunakan material berkualitas tinggi dan teknologi canggih dalam pembangunan jalan agar lebih tahan lama dan mampu menahan beban berat.

G. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Tabel 7.3.74 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Rasio Konektivitas Provinsi Kepulauan Riau

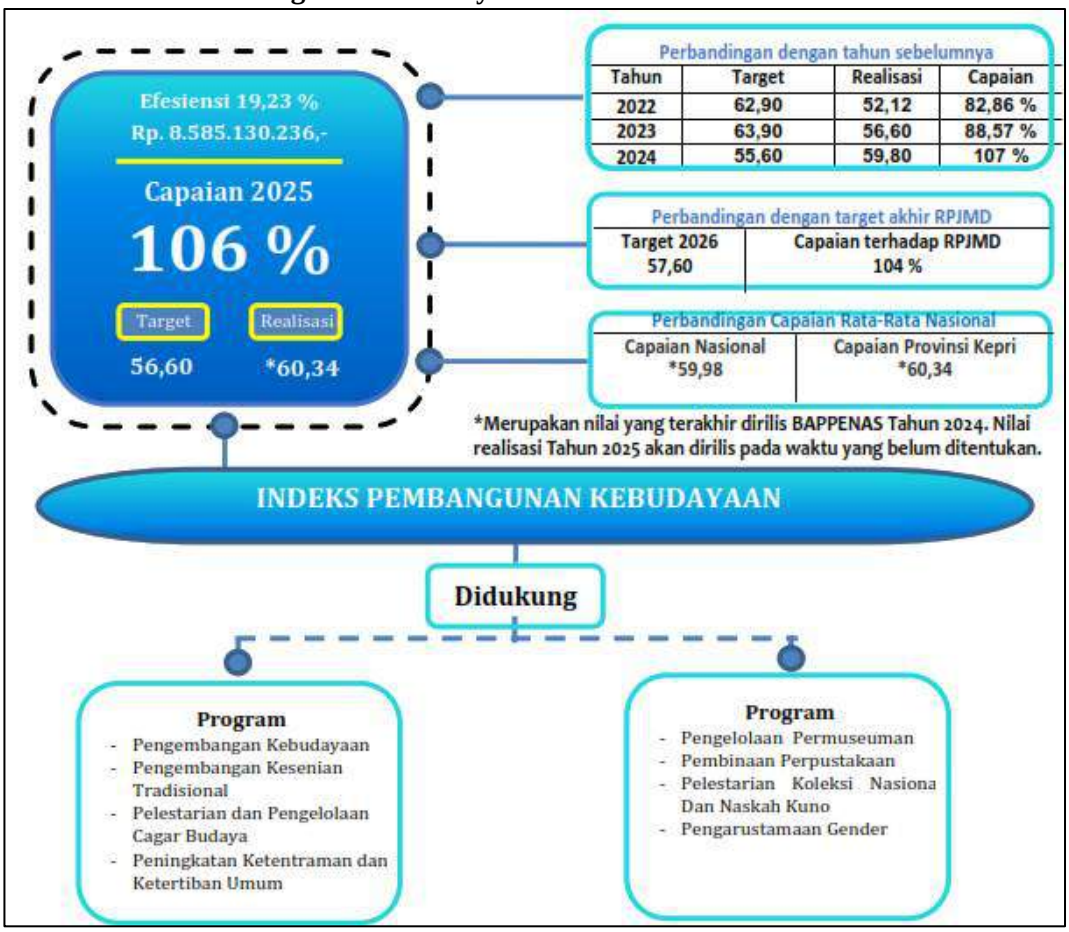
Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Pengelolaan Pelayaran	8.207.522.273,00	4.359.571.277,00	53
Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2.363.732.826,00	14.754.134,00	62
Program Penyelenggaraan Jalan	49.854.264.462,00	44.032.581.032,00	88,32
Total	**60.425.519.561,00**	**48.406.906.443,00**	**83,65**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp60.425.519.561,00 terealisasi sebesar Rp48.406.906.443,00 atau 80,11%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp12.018,613,118,00 (16,35%). Jika

dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Rasio Konektivitas (123%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (80,11%) dengan efesiensi 42,89%.

7.3.5.11. Sasaran Peningkatan Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat

7.3.5.11.1. Indeks Pembangunan Kebudayaan



Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Indeks Pembangunan Kebudayaan pada Tahun 2025 menggunakan Data Tahun 2024, capaian kinerja sudah baik dengan Indeks dari target sebesar 56,60 Indeks dan terealisasi sebesar 60,34 Indeks capaian kinerja sebesar 106%.

Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor. Dari ke-7 Dimensi yang termuat dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan

melibatkan peran Perangkat Daerah yang berkontribusi terhadap ketercapaian pembangunan melalui beberapa variabel indikator.

Berdasarkan Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2024, pembangunan kebudayaan Kepulauan Riau cukup baik, namun masih perlu terus ditingkatkan.

Metode Penghitungan indeks pembangunan kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data dari sumber-sumber tersebut.
2. Menghitung nilai setiap indikator.
3. Menghitung bobot setiap komponen.
4. Menghitung indeks pembangunan kebudayaan secara keseluruhan.

Adapun skala pengukuran sebagai berikut:

1. Indeks rendah (0-40): Pembangunan kebudayaan kurang.
2. Indeks sedang (41-60): Pembangunan kebudayaan cukup.
3. Indeks tinggi (61-80): Pembangunan kebudayaan baik.
4. Indeks sangat tinggi (81-100): Pembangunan kebudayaan sangat baik.

Dilihat dari 7 (tujuh) dimensi yang menggambarkan pembangunan kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau, masing-masing dimensi turut serta mendorong kenaikan nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Peningkatan pembinaan keagamaan, pelestarian budaya, dan harmoni masyarakat dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kenaikan yang cukup menggembirakan. Realisasi indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 menggunakan data tahun 2024 sebesar 60,34 Indeks dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 56,60 Indeks sehingga capaian kinerja sebesar 106% atau dalam kategori “Sangat Baik.”

Tabel 7.3.75 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
IPK	56,60 Indeks	60,34 Indeks	106%

Sumber : IPK Direktorat Kebudayaan, Bapennas, BPS Nasional

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Grafik 7.3.41 Tren Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan Prov Kepri 2022-2025



Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Capaian kinerja peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2025 belum dipublish oleh BAPPENAS dan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, sehingga capaian realisasi yang digunakan saat ini yaitu masih menggunakan capaian realisasi tahun 2024. Dengan demikian pada pelaporan LKJIP 2025 belum dapat membandingkan realisasi kinerja IPK 2025 dengan Realisasi Kinerja IPK Tahun 2024.

Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan menunjukkan tren peningkatan positif dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2021–2022, realisasi indeks belum mencapai target yang ditetapkan, yang mengindikasikan perlunya penguatan program dan sinergi lintas sektor dalam pembangunan kebudayaan. Namun demikian, pada tahun 2023 dan 2024 realisasi indeks berhasil melampaui target, masing-masing sebesar 58,90 dan 60,34, menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kebudayaan daerah.

Untuk tahun 2025, target ditetapkan sebesar 61,07, sementara realisasi belum tersedia karena masih dalam proses pengukuran. Capaian positif pada dua tahun sebelumnya menjadi modal penting untuk mendorong pencapaian target tahun 2025 melalui penguatan koordinasi, keberlanjutan program, dan peningkatan kualitas data pendukung.

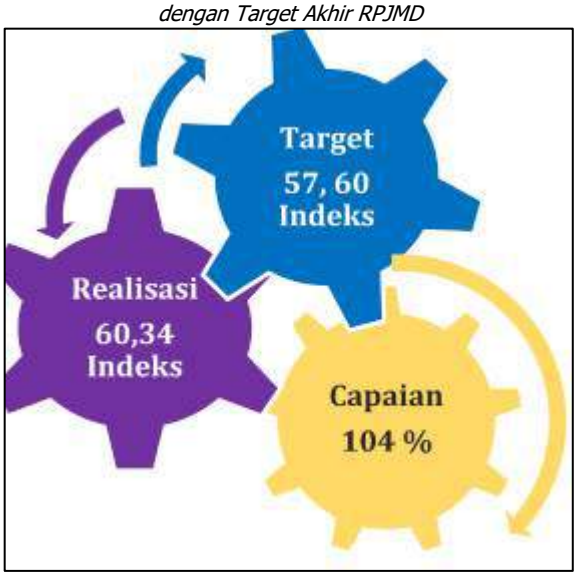
C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Ditinjau dari perspektif pencapaian target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, realisasi kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan sampai dengan tahun yang dinilai (Tahun 2024) tercatat sebesar 60,34 Indeks, lebih tinggi dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 57,60 Indeks. Dengan demikian, capaian kinerja telah mencapai 104%, yang menunjukkan bahwa kinerja pembangunan kebudayaan daerah telah melampaui target akhir RPJMD.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau berjalan secara efektif dan berkontribusi positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Ke depan, capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan keberlanjutan program, peningkatan sinergi lintas perangkat daerah, serta penguatan kualitas data dan monitoring

evaluasi agar kinerja pembangunan kebudayaan tetap berada pada jalur yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Grafik 7.3.42 Perbandingan Realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan Target Akhir RPJMD



Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan pada provinsi Kepulauan Riau dengan rentang nilai 0 - 100 sebesar 59,80 sedangkan untuk indeks pembangunan tingkat nasional 57,13. Pada tahun 2024 untuk realisasi indeks Pembangunan di Kepulauan Riau lebih tinggi dari nasional.

Tabel 7.3.76 Perbandingan Realiasasi Kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2018-2024

Tahun	Nasional	CAPAIAN IPK KEPULAUAN RIAU Per Tahun
2018	53.74	58.83
2019	55.91	60.90
2020	54.65	59,24
2021	51.90	52,12
2022	55,13	56,60
2023	57,13	58,80
2024	59,98	60,34

Sumber : IPK Direktorat Kebudayaan, Bapennas, BPS Nasional

Dapat diinformasikan posisi ketercapaian kinerja dibandingkan target nasional dengan data sebagaimana pada tabel tersebut sesuai dengan updated rilis data pada Tahun 2024, mengingat data 2025 masih menunggu publish kementerian BAPPENAS dan BPS RI.

Pada Tahun 2024 Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam 5 Besar Provinsi dengan Capaian Indeks Kebudayaan Terbaik, yaitu peringkat ke-5 setelah Provinsi Bali, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jawa Tengah.

E. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai kinerja didukung oleh faktor-faktor yang memengaruhi dalam meningkatkan ketercapaian indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, berikut adalah upaya-upaya yang dilaksanakan, yaitu:

I. Analisis IPK 2025 Provinsi Kepri per Indikator - Dimensi Ekonomi Budaya

Grafik 7.3.43 Persentase Penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan, terhadap masyarakat 15 tahun ke atas



Sumber : Kementerian Kebudayaan

Grafik tersebut menggambarkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan tersebut sebagai sumber penghasilan. Indikator ini digunakan untuk mengukur kontribusi aktivitas seni pertunjukan terhadap penguatan ekonomi budaya masyarakat. Pada tahun 2024, realisasi Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 0,20, sementara realisasi Kepulauan Riau pada periode sebelumnya berada pada 0,19. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja, meskipun relatif kecil, yang mengindikasikan bahwa program dan kegiatan di bidang pengembangan seni pertunjukan mulai memberikan dampak terhadap peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku ekonomi budaya. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan realisasi nasional sebesar 0,31, capaian Kepulauan Riau masih berada di bawah rata-rata nasional. Perbedaan ini menunjukkan bahwa skala dan intensitas keterlibatan masyarakat dalam seni pertunjukan sebagai sumber penghasilan di tingkat daerah masih terbatas, baik dari sisi jumlah pelaku, akses pasar, maupun ekosistem pendukung.indikator ini telah memenuhi prinsip terukur dan relevan, namun capaian kinerja menunjukkan masih adanya gap kinerja terhadap *benchmark* nasional. Kondisi ini menjadi dasar bagi perlunya penguatan efektivitas program, antara lain melalui peningkatan pembinaan pelaku

Berikut adalah analisis faktor kegagalan dan keberhasilan Dimensi Ekonomi Budaya, sebagai berikut :

1. Faktor Keberhasilan Dimensi Ekonomi Budaya

a. Kekayaan Potensi Budaya Lokal. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya Melayu yang kuat, mencakup seni pertunjukan, tradisi lisan, kerajinan, kuliner, dan warisan maritim. Potensi ini menjadi modal dasar dalam pengembangan ekonomi budaya dan memberikan peluang untuk dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi pada tahun 2025 dinas kebudayaan melaksanakan *event* yang berkolaborasi dengan UMKM dengan melibatkan para pelaku budaya dalam seni pertunjukan yaitu Festival Budaya Melayu;

b. Keterkaitan dengan Sektor Pariwisata. Sejumlah kegiatan budaya telah terintegrasi dengan agenda pariwisata daerah, seperti festival budaya, event adat, dan atraksi seni tradisional yang mendukung kunjungan wisatawan. Hal ini menunjukkan adanya kontribusi budaya terhadap pergerakan ekonomi lokal, khususnya di kawasan destinasi wisata;

c. Peran Komunitas dan Pelaku Budaya. Keberadaan sanggar seni, komunitas budaya, dan pelaku usaha berbasis budaya di berbagai kabupaten/kota menjadi faktor pendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi budaya. Meskipun berskala kecil, aktivitas ini menunjukkan adanya dinamika ekonomi berbasis budaya di tingkat masyarakat;

d. Dukungan Kebijakan Dasar Pemajuan Kebudayaan ditahun 2025 program kegiatan yang mendukung terkait dengan dimensi budaya ini adalah pemberian Hibah uang kepada pelaku pelaku budaya dan sanggar seni yang telah berbadan hukum ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menaikan nilai ekonomi budaya meskipun belum optimal di kerenakan keterbatasan anggaran.

2. Faktor Kegagalan / Hambatan Dimensi Ekonomi Budaya

a. Belum Optimalnya Hilirisasi dan Komersialisasi Budaya. Pemanfaatan budaya masih berorientasi pada pelestarian dan seremoni, belum diarahkan secara sistematis pada pengembangan produk dan jasa budaya yang bernilai ekonomi tinggi. Akibatnya, kontribusi ekonomi budaya terhadap pendapatan masyarakat dan daerah masih terbatas;

b. Rendahnya Kapasitas Kewirausahaan Pelaku Budaya. Sebagian besar pelaku budaya belum memiliki keterampilan manajerial, kewirausahaan, dan literasi digital yang memadai. Keterbatasan ini berdampak pada kualitas produk, strategi pemasaran, serta kemampuan menjangkau pasar yang lebih luas;

c. Keterbatasan Akses Pembiayaan dan Insentif. Pelaku ekonomi budaya masih menghadapi kendala dalam mengakses sumber pembiayaan, permodalan, serta insentif ekonomi. Skema pendanaan yang ada belum sepenuhnya ramah terhadap karakteristik usaha budaya yang bersifat kreatif dan berbasis komunitas;

d. Lemahnya Integrasi Lintas Sektor. Sinergi antara sektor kebudayaan, pariwisata, pendidikan, koperasi dan UMKM, serta ekonomi kreatif belum berjalan optimal. Program pengembangan ekonomi budaya masih bersifat sektoral, sehingga dampaknya terhadap peningkatan indikator IPK belum signifikan;

e. Keterbatasan Data dan Indikator Ekonomi Budaya. Pendataan aktivitas dan nilai ekonomi budaya belum terkelola secara sistematis dan terintegrasi. Akibatnya, kontribusi ekonomi budaya sulit diukur secara kuantitatif dan belum sepenuhnya tercermin dalam indikator IPK;

f. Tantangan Geografis Wilayah Kepulauan. Kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari banyak pulau menyebabkan keterbatasan akses distribusi, pemasaran, serta pembinaan pelaku budaya. Hal ini berdampak pada ketimpangan pengembangan ekonomi budaya antarwilayah.

II. Analisis IPK 2025 Provinsi Kepri per Indikator - Dimensi Pendidikan

Indeks Pembangunan Kebudayaan pada dimensi pendidikan merupakan indikator yang mengukur sejauh mana sistem pendidikan berperan dalam mendukung pelestarian, pengembangan, dan pemajuan kebudayaan. Dimensi ini menilai integrasi nilai-nilai budaya dalam kurikulum, keberadaan muatan lokal, pembelajaran seni dan tradisi daerah, serta partisipasi peserta didik dalam kegiatan budaya. Pendidikan memiliki posisi strategis karena menjadi media utama dalam mentransmisikan pengetahuan, nilai, dan identitas budaya kepada generasi muda secara terstruktur dan berkelanjutan.

Beberapa faktor pendukung peningkatan indeks pada dimensi pendidikan antara lain kebijakan pemerintah yang mendorong penguatan muatan lokal dan pendidikan karakter berbasis budaya, ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten di bidang seni dan budaya, serta dukungan sarana dan prasarana pembelajaran. Selain itu, kolaborasi antara sekolah dengan komunitas budaya, sanggar seni, dan tokoh adat juga memperkaya proses pembelajaran. Akses pendidikan yang merata dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya di lingkungan pendidikan turut memperkuat capaian dimensi ini.

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor penghambat yang dapat menurunkan capaian indeks. Keterbatasan anggaran untuk kegiatan kebudayaan di sekolah, minimnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus di bidang budaya lokal, serta kurangnya pembaruan materi ajar yang relevan dengan perkembangan zaman menjadi tantangan utama. Selain itu, pengaruh globalisasi dan dominasi budaya populer sering kali mengurangi minat generasi muda terhadap budaya lokal apabila tidak diimbangi dengan strategi pembelajaran yang inovatif.

III. Analisis IPK 2025 Provinsi Kepri per Indikator - Dimensi Ketahanan Sosial Budaya

Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran sebagai perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum mempunyai kontribusi dalam pencapaian indeks pembangunan kebudayaan pada dimensi ketahanan sosial budaya. Indikator yang diintervensi oleh Satpol PP pada dimensi ketahanan social budaya adalah:

1. Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanaan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dengan target 11,83;
2. Persentase rumah tangga yang merasa percaya menitipkan rumah kepada tetangga, dengan target 85,27.

Program yang mendukung peningkatan pembinaan keagamaan, pelestarian budaya dan harmoni masyarakat adalah program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.

Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum digunakan untuk kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan penegakan perda/perkada. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengawalan dan pengamanan serta penanganan unjuk rasa/demo. Sedangkan penegakan perda/perkada dilakukan melalui pengawasan kepatuhan atas pelaksanaan perda dan perkada, sosialisasi sanksi perda dan perkada dan penanganan atas pelanggaran perda dan perkada.

IV. Analisis IPK 2025 Provinsi Kepri per Indikator - Dimensi Warisan Budaya

Berikut adalah analisis faktor kegagalan dan keberhasilan Dimensi Warisan Budaya, sebagai berikut :

1. Faktor Keberhasilan Dimensi Warisan Budaya

    a. Kekayaan Warisan Budaya Melayu dan Maritim. Provinsi Kepulauan Riau memiliki warisan budaya yang kuat dan khas, terutama budaya Melayu yang berkembang seiring sejarah maritim, perdagangan, dan kesultanan. Warisan tersebut meliputi situs sejarah, bangunan cagar budaya, tradisi lisan, adat istiadat, manuskrip, serta praktik budaya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil ditahun 2025 Dinas kebudayaan telah melakukan pelestarian cagar budaya dapur arang di kabupaten bintan;

    b. Keberadaan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan Cagar Budaya. Terdapat sejumlah ODCB dan cagar budaya yang telah teridentifikasi di berbagai kabupaten/kota, baik berupa bangunan, struktur, situs, maupun kawasan bersejarah. Dinas Kebudayaan sendiri memiliki 10.589 koleksi yang tersimpan dan dikelola pada galeri Dinas Kebudayaan. Koleksi tersebut terdiri atas berbagai jenis benda budaya dan sejarah yang memiliki nilai penting sebagai sumber pengetahuan, identitas budaya, serta warisan sejarah daerah. Seluruh koleksi menjadi objek pengelolaan yang memerlukan upaya pelindungan, perawatan, dan konservasi secara berkelanjutan guna menjaga kondisi fisik serta nilai informasinya ditahun 2025 dinas kebudayaan telah melakukan konservasi terhadap koleksi yang ada di galeri sebanyak 302 koleksi;

    c. Peran Komunitas Adat dan Masyarakat Lokal. Masyarakat adat dan komunitas lokal di Kepulauan Riau masih mempraktikkan dan menjaga tradisi serta nilai budaya secara turun-temurun. Keterlibatan komunitas ini berperan penting dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya tak benda, dengan adanya program kegiatan ditahun 2025 yang mendukung terkait ketercapaian dari nilai warisan budaya yaitu pagelaran Pembukaan STQH 2025 Prov. Kepulauan Riau Tari Kolosal, Ghazal, Musik, Ghazal dan Lagu Melayu kegiatan ini adalah kegiatan *croscutting* antara dinas kebudayaan dan Biro Kesra;

    d. Komitmen Pemerintah dalam Pelestarian Budaya. Adanya program dan kegiatan pelestarian warisan budaya, seperti pendataan, penetapan cagar

budaya, pemeliharaan situs, serta dokumentasi budaya takbenda, adalah penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) sebagai WBTb Indonesia dengan target 2 WBTB capaian indikator sebanyak 14 WBTB yang ditetapkan sebagai WBTB Indonesia dari total 247 wbtb yang sudah dalam pencatatan, Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat pelindungan, pengakuan, dan legitimasi formal terhadap warisan budaya daerah pada tingkat nasionalmenunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya.

2. Faktor Kegagalan / Hambatan Dimensi Warisan Budaya

   a. Belum Optimalnya Perlindungan dan Pemeliharaan Cagar Budaya. Sebagian warisan budaya, khususnya cagar budaya fisik, belum dikelola dan dipelihara secara optimal. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia teknis, serta sarana pendukung menyebabkan kondisi beberapa situs dan bangunan bersejarah mengalami degradasi atau kerusakan.

   b. Rendahnya Tingkat Penetapan dan Legalitas Warisan Budaya. Masih banyak objek warisan budaya yang belum ditetapkan secara resmi sebagai cagar budaya atau warisan budaya takbenda. Keterbatasan proses kajian, administrasi, dan koordinasi antarinstansi menyebabkan capaian penetapan belum maksimal dan berdampak pada rendahnya skor indikator IPK.

   c. Keterbatasan SDM Ahli dan Tenaga Teknis. Ketersediaan tenaga ahli pelestarian budaya, seperti arkeolog, sejarawan, konservator, dan juru pelihara, masih terbatas. Kondisi ini menghambat proses identifikasi, pelindungan, pemanfaatan, dan pengembangan warisan budaya secara berkelanjutan.

   d. Minimnya Pemanfaatan Warisan Budaya secara Edukatif dan Ekonomis. Warisan budaya masih cenderung diposisikan sebagai objek yang dilindungi, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pendidikan, pariwisata budaya, dan ekonomi kreatif. Akibatnya, nilai tambah warisan budaya belum berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

   e. Tantangan Geografis dan Pemerataan Pelestarian. Kondisi geografis Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan menyebabkan pelestarian warisan budaya tidak merata. Banyak warisan budaya yang berada di pulau-pulau kecil sulit dijangkau untuk pendataan, pemeliharaan, dan pengawasan, sehingga berpotensi terabaikan.

V. Analisis IPK 2025 Provinsi Kepri per Indikator - Dimensi Ekspresi Budaya

Berikut adalah analisis faktor kegagalan dan keberhasilan Dimensi Ekspresi Budaya, sebagai berikut:

1. Faktor Keberhasilan Dimensi Ekspresi Budaya

   a. Ekspresi budaya di Provinsi Kepulauan Riau relatif masih hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya seni pertunjukan Melayu, tradisi adat, musik, tari, sastra lisan, dan ritual budaya, ditahun 2025

Dinas kebudayaan berkolaborasi dengan pelaku pelaku budaya yang ada di kepulauan Riau melaksanakan program kegiatan yang menampilkan 20 kesenian tradisional Tari Kreasi Melayu Kolosal, Musik Melayu, Ghazal, Silat, Makyong, dan Sandiwara Bangsawan dengan melibatkan Komunitas/ Sanggar Seni/Paguyuban yang ada di Tanjunpinang dan sanggar sanggar kesenian yang ada di tanjungpinang dilaksanakan di Pelataran parkir Gedung Lembaga adat melayu pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2025;

b. Peran Komunitas dan Sanggar Seni. Keberadaan sanggar seni, komunitas budaya, dan pelaku seni yang aktif menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan ekspresi budaya. Kegiatan latihan, pertunjukan, dan partisipasi dalam berbagai event budaya menunjukkan adanya ekosistem ekspresi budaya di tingkat lokal di tahun 2025 Dinas Kebudayaan juga memberikan hibah berupa uang kepada sanggar sanggar yang sudah berbadan hukum sebagai bentuk dukungan kepada pelaku budaya untuk bisa lebih mengapresiasi dan berkreativitas dalam pemajuan kebudayaan;

c. Ditahun 2025 dukungan program dari Pemerintah daerah secara rutin menyelenggarakan dan memfasilitasi berbagai kegiatan seni dan budaya, seperti festival budaya, peringatan hari besar adat, dan pagelaran seni tradisional itu tidak hanya di dinas kebudayaan tetapi juga ada di pariwisata dan biro kesra.

2. Faktor Kegagalan / Hambatan Dimensi Ekspresi Budaya

a. Belum Meratanya Ruang dan Akses Ekspresi Budaya. Ruang ekspresi budaya, seperti gedung kesenian, panggung terbuka, dan fasilitas pertunjukan, belum tersedia secara merata di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Kondisi ini membatasi frekuensi dan jangkauan kegiatan ekspresi budaya, terutama di wilayah kepulauan dan pulau-pulau kecil.

b. Ketergantungan pada Kegiatan Seremonial. Ekspresi budaya masih banyak bergantung pada agenda seremonial pemerintah dan event tertentu, sehingga belum berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Akibatnya, intensitas dan keberlanjutan ekspresi budaya belum optimal dan berdampak pada fluktuasi nilai indikator IPK.

c. Rendahnya Regenerasi Pelaku Seni. Minat dan keterlibatan generasi muda dalam ekspresi budaya tradisional masih relatif terbatas. Pengaruh budaya global dan perubahan gaya hidup menyebabkan regenerasi pelaku seni berjalan lambat, yang berpotensi melemahkan keberlanjutan ekspresi budaya.

d. Keterbatasan Dukungan Pembiayaan dan Insentif. Pelaku seni dan komunitas budaya masih menghadapi keterbatasan dukungan pembiayaan dan insentif yang berkelanjutan. Hal ini berdampak pada kualitas produksi seni, frekuensi pertunjukan, dan profesionalisme pelaku seni.

VI. Analisis IPK 2025 Provinsi Kepri per Indikator - Dimensi Budaya Literasi

Berikut adalah analisis faktor kegagalan dan keberhasilan Dimensi Budaya Literasi, sebagai berikut:

1. Faktor Keberhasilan Dimensi Budaya Literasi

    a. Menghadirkan ketersediaan perpustakaan yang menarik, dimana perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku tapi juga pusat komunitas belajar. Koleksi bahan bacaan yang *up to date* dan kegiatan kreatif bisa meningkatkan daya tarik perpustakaan;

    b. Pemanfaatan Teknologi dapat memperluas jangkauan literasi dan menarik generasi muda, adanya Buku Digital, *Podcast Edukatif* dan aplikasi membaca bisa menjadi alternatif menarik;

    c. Program membiasakan membaca sejak dini, Orang tua dan guru perlu membacakan cerita kepada anak-anak sejak usia dini. Ini menumbuhkan kecintaan terhadap buku dan meningkatkan kemampuan bahasa mereka;

    d. Partisipasi Komunitas dan Masyarakat, komunitas literasi menjadikan membaca dan menulis sebagai aktivitas sosial dan budaya. Interaksi sosial dalam komunitas memperkuat motivasi dan rasa memiliki terhadap literasi

    e. Pengembangan Pojok Baca di ruang publik, perpustakaan keliling dan kerjasama dengan lintas sektor pemerintahan, sekolah, perguruan tinggi dan swasta;

    f. Melakukan inovasi program literasi, Festival literasi dan budaya, Lomba menulis, dan mendongeng menjadikan literasi sebagai pengalaman sosial dan budaya yang menyenangkan;

    g. Gerakan Literasi Sekolah dan Komunitas, Program seperti Gerakan Literasi Nasional (GLN), lomba menulis, bedah buku, dan diskusi terbuka bisa meningkatkan semangat literasi di kalangan pelajar dan masyarakat umum;

    h. Optimalisasi teknologi digital, platform perpustakaan digital daerah, aplikasi membaca gratis dan legal serta pemanfaatan media sosial untuk kampanye literasi;

    i. Memberikan Penghargaan atas Prestasi literasi, Penghargaan bagi penulis muda, pembaca terbanyak, atau komunitas literasi yang aktif bisa menjadi motivasi tersendiri untuk terus mengembangkan budaya literasi.

2. Faktor Kegagalan / Hambatan Dimensi Ekspresi Budaya

    a. Rendahnya Minat Baca, Literasi sering dipersepsikan sebagai kewajiban akademik bukan kebutuhan atau kebiasaan, sehingga partisipasi belum tumbuh secara intrinsik;

    b. Masih kurangnya akses sarana literasi, Perpustakaan di banyak daerah masih minim, akses internet tidak merata, dan kurikulum pendidikan belum sepenuhnya mendukung pengembangan budaya literasi secara menyeluruh;

    c. Keterbatasan kualitas dan relevansi bahan bacaan, bahwa bahan bacaan kurang kontekstual, kurang menarik dan minim muatan budaya lokal sehingga masyarakat kurang tertarik membaca;

d. Pengaruh *Gadget* dan Media Sosial, di satu sisi, *gadget* dan media sosial bisa menjadi alat pembelajaran, tapi di sisi lain juga dapat mengalihkan perhatian dari kegiatan literasi yang lebih mendalam seperti membaca buku atau menulis jurnal;

e. Lemahnya Budaya Literasi dalam Keluarga , orang tua belum menjadikan literasi sebagai kebiasaan di rumah dan kurang memberi teladan membaca. Pembiasaan literasi sejak dini tidak terbentuk secara optimal.

VII. Analisis IPK 2025 Provinsi Kepri per Indikator - Dimensi Kesetaraan Gender

Dalam rangka mengetahui capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Dimensi Gender, Provinsi Kepulauan Riau dengan memotret upaya-upaya peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang beririsan dengan variabel Dimensi Gender pada indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan, dimana IPG adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keseimbangan hasil pembangunan antara laki- laki dan perempuan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPG menunjukkan sejauh mana pembangunan mampu menghadirkan kesempatan dan hasil yang setara bagi kedua gender, sehingga menjadi gambaran penting terkait keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Semakin tinggi nilai IPG, semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, yang menandakan terciptanya lingkungan sosial yang lebih inklusif, adil, dan mendukung pemberdayaan gender dalam berbagai sektor kehidupan.

Faktor pendukung peningkatan indeks pada dimensi ini antara lain adanya kebijakan yang responsif gender, program pemberdayaan perempuan di sektor seni dan budaya, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan peran. Dukungan regulasi yang menjamin akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan, dan pendanaan kegiatan budaya juga berkontribusi positif. Selain itu, keberadaan komunitas seni dan organisasi perempuan yang aktif dalam melestarikan budaya lokal dapat memperkuat keterlibatan perempuan secara signifikan.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi capaian dimensi kesetaraan gender. Norma sosial dan budaya yang masih bias gender, pembagian peran tradisional yang membatasi ruang gerak perempuan, serta rendahnya representasi perempuan dalam posisi pengambilan keputusan di bidang kebudayaan menjadi tantangan utama. Keterbatasan akses terhadap sumber daya, seperti pendanaan dan jaringan profesional, juga dapat menghambat partisipasi perempuan secara optimal.

F. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan indeks Pembangunan Kebudayaan dan mengurangi permasalahan dan kedala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepanya dengan cara:

1. Mengembangkan perencanaan strategis;
2. Mengembangkan infrastruktur budaya;
3. Meningkatkan kerjasama antar-stakeholder;
4. Mengembangkan produk dan jasa budaya yang inovatif;

5. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia;
6. Meningkatkan pemasaran dan promosi produk budaya;
7. Penguatan ekosistem ekonomi budaya berbasis UMKM dan ekonomi kreatif;
8. Peningkatan kapasitas pelaku budaya (wirausaha, digitalisasi, manajemen);
9. Integrasi kebijakan kebudayaan – pariwisata - ekraf;
10. Penyusunan data ekonomi budaya yang terukur dan berkelanjutan;
11. Pengembangan event budaya berorientasi ekonomi;
12. Perlu percepatan penetapan dan perlindungan warisan budaya;
13. Penguatan SDM pelestarian dan kelembagaan;
14. Integrasi warisan budaya dengan pendidikan dan pariwisata budaya;
15. Pelibatan aktif masyarakat dan generasi muda;
16. Penguatan Perencanaan Berbasis Dimensi dan Indikator IPK.

    Dinas Kebudayaan perlu memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan dirancang secara langsung mendukung dimensi dan indikator IPK. Perencanaan kinerja harus berbasis pada hasil pengukuran IPK, khususnya pada dimensi yang masih memiliki nilai rendah.

    Tindak lanjut:

    a. Menyelaraskan Renstra, Renja, dan IKU Dinas Kebudayaan dengan indikator IPK;
    b. Memprioritaskan program pada dimensi IPK dengan capaian terendah (misalnya ekonomi budaya).

17. Peningkatan Kualitas Program dan Dampak Kegiatan.

    Perbaikan tidak hanya difokuskan pada kuantitas kegiatan, tetapi pada kualitas dan dampaknya terhadap masyarakat serta indikator IPK.

    Tindak lanjut:

    a. Mengubah pendekatan kegiatan dari berbasis output menjadi berbasis *outcome*;
    b. Memastikan setiap kegiatan kebudayaan memiliki indikator keberhasilan yang jelas;
    c. Melakukan evaluasi efektivitas program secara berkala.

18. Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor.

    Pencapaian IPK tidak dapat dicapai hanya oleh Dinas Kebudayaan. Diperlukan kolaborasi aktif dengan OPD terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

    Tindak lanjut :

    a. Membangun koordinasi intensif dengan OPD sektor pariwisata, pendidikan, UMKM, dan ekonomi kreatif;

b. Mengembangkan program kolaboratif lintas OPD berbasis kebudayaan;

c. Melibatkan komunitas budaya, akademisi, dan pelaku usaha.

19. Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kebudayaan.

    Kualitas SDM menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pencapaian IPK. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur dan pelaku budaya perlu menjadi prioritas

    Tindak lanjut:

    a. Pelatihan perencanaan dan evaluasi kinerja berbasis IPK;

    b. Peningkatan kompetensi teknis pelestarian, pengelolaan, dan pemanfaatan budaya;

    c. Penguatan peran kelembagaan kebudayaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

20. Penguatan Sistem Data, Monitoring, dan Evaluasi.

    Data yang akurat dan mutakhir sangat penting untuk mendukung perencanaan dan pengukuran capaian IPK.

    Tindak lanjut:

    a. Pengembangan basis data kebudayaan terintegrasi;

    b. Pemutakhiran data warisan budaya, pelaku budaya, dan aktivitas kebudayaan;

    c. Monitoring dan evaluasi capaian IPK secara periodik.

21. Optimalisasi Pemanfaatan Kebudayaan sebagai Sumber Daya Pembangunan.

    Kebudayaan perlu diposisikan sebagai sumber daya strategis, bukan hanya objek pelestarian. Tindak lanjut :

    a. Pengembangan ekonomi budaya dan pemanfaatan warisan budaya

    b. Integrasi kebudayaan dalam pembangunan pariwisata dan pendidikan

    c. Peningkatan peran kebudayaan dalam penguatan identitas dan kesejahteraan masyarakat.

22. Penguatan Komitmen Institusi, menjadikan budaya literasi sebagai nilai utama dalam visi, misi, dan kebijakan organisasi/sekolah serta menetapkan indikator kinerja literasi yang terukur;

23. Pembiasaan Literasi, melaksanakan kegiatan membaca dan menulis secara rutin, seperti membaca sebelum pembelajaran, membuat rangkuman, resensi buku, dan jurnal reflektif;

24. Pemanfaatan Teknologi dan Literasi Digital, mengoptimalkan perpustakaan digital, *e-book,* dan *platform* pembelajaran daring, serta meningkatkan kemampuan memilah informasi yang valid dan kredibel;

25. Penyediaan sarana dan lingkungan literasi, menyediakan sudut baca, bahan bacaan yang bervariasi dan relevan, serta menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung kegiatan literasi.

G. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

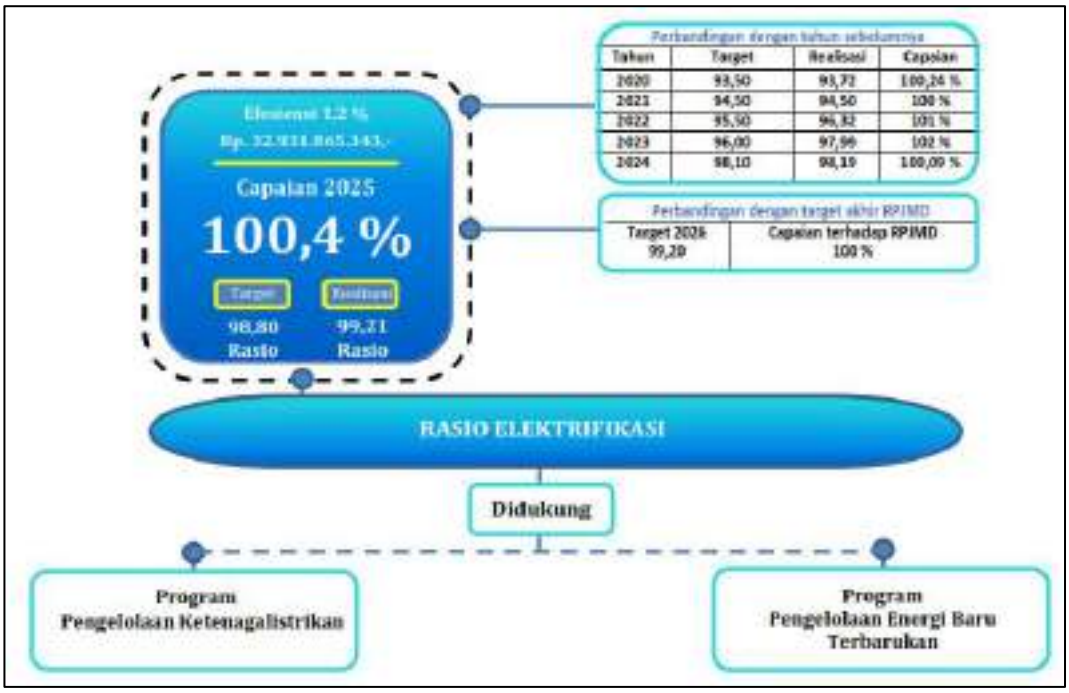
Tabel 7.3.77 Program/Kegiatan dan Realisasi Anggaran

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Pengembangan Kebudayaan	1.948.428.405,00	1.932.034.295,00	99,16
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	717.890.436,00	587.479.841,00	81,83
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	198.972.165,00	196.442.806,00	98,73
Program Pengelolaan Permuseuman	190.579.784,00	184.050.784,00	96,57
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum	2.524.776.894,00	2.132.456.256,00	84,46
Program Pembinaan Perpustakaan	2.177.602.637,00	1.688.357.812,00	77,53
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	40.790.000,00	36.733.175,00	90,05
Pengarustamaan Gender	786.089.915,00	691.593.745,00	87,98
Total	**8.585.130.236,00**	**7.449.148.714,00**	**86,77**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp8.585.130.236,00 terealisasi sebesar Rp7.449.148.714,00 atau 86,77%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp1.135.981.522,00 (13,23%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan (106%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (86,77%) dengan efesiensi 19,23%.

7.3.5.12. Sasaran Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar

7.3.5.12.1. Rasio Elektrifikasi



Rasio Elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non PLN dengan jumlah rumah tangga total. Rasio Elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Rasio Elektrifikasi pada Tahun 2025 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 99,21 Rasio dari target sebesar 98,80 Rasio dan terealisasi sebesar 100,4%

Rasio Elektrifikasi adalah indikator yang menggambarkan persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap layanan listrik dibandingkan dengan total rumah tangga di suatu wilayah. Rasio ini menjadi ukuran penting bagi pemerintah dalam menilai keberhasilan pembangunan infrastruktur energi serta pemerataan akses layanan dasar bagi masyarakat. Semakin tinggi rasio elektrifikasi, semakin luas pula jangkauan listrik yang dinikmati masyarakat, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas hidup, memperkuat aktivitas ekonomi, serta mendukung pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai capaian kinerja, berikut informasi capaian dan analisa terhadap indikator Rasio Elektrifikasi.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 7.3.78 Capaian Rasio Elektrifikasi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rasio Elektrifikasi	98,80 Rasio	99,21 Rasio	100,4%

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kepri

Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dapat dilihat dari indikator Rasio Elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kenaikan yang

cukup menggembirakan. Realisasi indikator Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 99,21 Rasio dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 98,80 Rasio sehingga capaian kinerja sebesar 100,4% atau dalam kategori "Sangat Baik."

Tabel 7.3.79 Perhitungan Rasio Elektrifikasi Tahun 2025

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota	Rumah Tangga Kabupaten/ Kota	Rumah Tangga Berlistrik				Rumah Tangga Belum Berlistrik	RE(%)
				PLN	Non PLN	LTSHE	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5)+(6)+(7)	(9)	(10)={(8)/(4)}*100
	Kepulauan Riau	**2.300.020**	**644.866**	**637.436**	**2.202**	**296**	**639.744**	**5.122**	**99,21%**
1	Karimun	275.383	86.095	85.312	266	-	85.578	517	99,40%
2	Natuna	84.600	26.688	25.676	-	-	25.676	1.012	96,21%
3	Lingga	101.309	31.758	30.152	47	161	30.199	1.559	95,09%
4	Batam	1.365.266	338.681	336.243	1.663	106	338.012	669	99,80%
5	Kep. Anambas	51.045	16.205	15.673	20	29	15.693	512	96,84%
6	Bintan	182.355	59.142	58.197	206	-	58.403	739	98,75%
7	Tanjungpinang	240.062	86.297	86.183	-	-	86.183	114	99,87%

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kepri

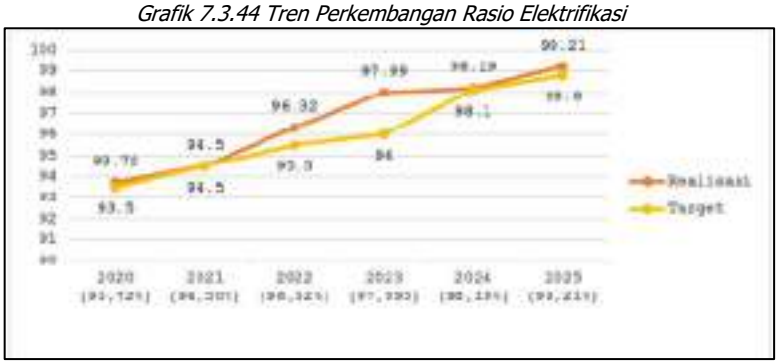
Rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat tinggi, yaitu sebesar 99,21%. Dari total 644.866 rumah tangga, sebanyak 639.744 rumah tangga telah menikmati akses listrik, baik melalui jaringan PLN, Non-PLN, maupun LTSHE, sementara 5.122 rumah tangga masih tercatat belum berlistrik. Capaian ini menggambarkan bahwa upaya pemerataan akses energi listrik di Kepulauan Riau telah berjalan efektif, meskipun masih terdapat sebagian kecil rumah tangga yang perlu menjadi perhatian lanjutan.

Kota Batam dan Kota Tanjungpinang mencatat rasio elektrifikasi tertinggi, masing-masing sebesar 99,80 persen dan 99,87 persen, yang mencerminkan infrastruktur kelistrikan yang relatif matang dan dominasi pasokan listrik melalui jaringan PLN. Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan juga menunjukkan capaian yang sangat baik dengan rasio di atas 98 persen, meskipun masih terdapat ratusan rumah tangga yang belum berlistrik, terutama di wilayah yang tersebar dan memiliki tantangan geografis.

Sementara itu, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki rasio elektrifikasi yang relatif lebih rendah dibandingkan daerah lainnya, yaitu berkisar antara 95,09 persen hingga 96,84 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah kepulauan terluar dan terpencil masih menghadapi kendala dalam penyediaan akses listrik, baik dari sisi jaringan PLN maupun pemanfaatan sumber energi alternatif seperti LTSHE. Jumlah rumah tangga belum berlistrik di wilayah-wilayah tersebut masih cukup signifikan dan memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah.

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Grafik 7.3.44 Tren Perkembangan Rasio Elektrifikasi



Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kepri

Dapat dilihat pada grafik diatas, menunjukkan tren peningkatan rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2020 - 2025, baik dari sisi target maupun realisasi. Secara umum, grafik memperlihatkan kecenderungan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses listrik kepada masyarakat. Pada tahun 2020, rasio elektrifikasi terealisasi sebesar 93,72 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan target sebesar 93,5 persen. Kondisi ini menandakan capaian awal yang relatif baik meskipun masih terdapat tantangan dalam pemerataan akses listrik.

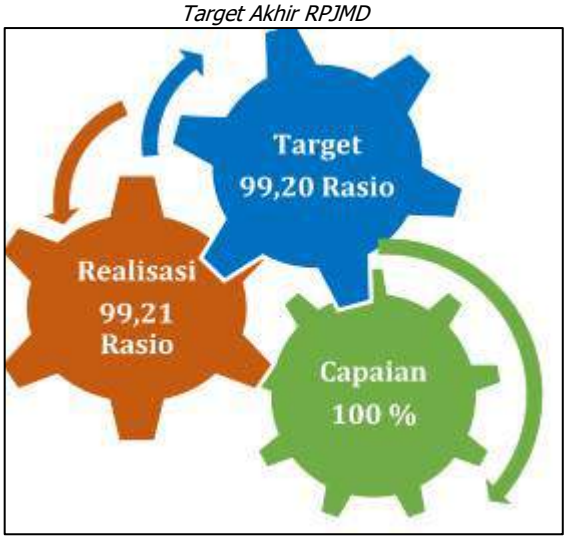
Pada tahun 2021 hingga 2023, rasio elektrifikasi terus mengalami peningkatan signifikan. Realisasi tahun 2021 mencapai 94,5 persen dan kembali sejalan dengan target yang ditetapkan. Selanjutnya, pada tahun 2022 dan 2023, realisasi rasio elektrifikasi meningkat menjadi 96,32 persen dan 97,99 persen, yang keduanya melampaui target tahunan. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas program dan kegiatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

Memasuki tahun 2024 dan 2025, rasio elektrifikasi semakin mendekati kondisi elektrifikasi penuh. Pada tahun 2024, realisasi mencapai 98,19 persen, sejalan dengan target yang ditetapkan, dan meningkat kembali pada tahun 2025 menjadi 99,21 persen, melampaui target sebesar 98,8 persen. Tren ini mengindikasikan bahwa upaya penyediaan akses listrik telah berjalan optimal dan semakin merata di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Capaian kinerja peningkatan Rasio Elektrifikasi tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1.02 Rasio. Dimana pada tahun 2024 Rasio Elektrifikasi sebesar 98,19 Rasio meningkat menjadi 99,21 Rasio pada tahun 2025.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Grafik 7.3.45 Perbandingan Realisasi Rasio Elektrifikasi dengan Target Akhir RPJMD



Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kepri

D. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai kinerja didukung oleh faktor-faktor yang memengaruhi dalam meningkatkan ketercapaian indikator Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, berikut adalah upaya-upaya yang dilaksanakan, yaitu:

1. Terlaksananya bantuan Penyambungan Listrik (BPBL) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi bagi Rumah Miskin di wilayah Kabupaten Karimun dan Kota Batam;
2. Kegiatan pemeliharaan mesin genset yang akan di operasikan oleh PT. PLN (Persero) serta adanya kegiatan penambahan pembangunan ketenagalistrikan dari PT. PLN (Persero) di beberapa daerah di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:
   a. Pulau Bertam Kelurahan Kasu Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam;
   b. Pulau Lingka Kelurahan Kasu Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam;
   c. Pulau Nguan Kelurahan Galang Baru Kecamatan Galang, Kota Batam.
3. Adanya kegiatan penambahan pembangunan kabel laut dari PT. PLN (Persero) dari Pulau Pemping ke Pulau Labun Kelurahan Pemping Kecamatan Belakang Padang Kota Batam.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya melakukan upaya-upaya diatas, terdapat upaya lainnya yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja, yaitu:

1. Mendorong Peran aktif dari pemilik wilayah usaha ketenagalistrikan berupa bantuan CSR dalam bentuk Bantuan Penyambungan Listrik (BPBL), peran

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.

2. Pemasangan genset dengan Lokasi Pemasangan di Pulau Nuja Kab. Lingga sebanyak 1 unit, di Pulau Bahan Kab. Karimun sebanyak 1 unit.

Dalam pelaksanaan terdapat permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan rasio elektrifikasi, sebagai berikut:

1. Kondisi geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari ribuan pulau-pulau kecil dan jarak antara pulau yang terpisah jauh dan keterbatasan anggaran baik di PT. PLN (Persero), Pemerintah Pusat maupun APBD.
2. Rumah tangga yang berada dalam satu pulau kecil juga masih tersebar dengan jumlah rumah tangga yang terbatas sehingga membutuhkan biaya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang cukup besar.
3. Adanya peraturan pemerintah yang meminta PT. PLN (Persero) untuk melakukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berbasis energi bersih sehingga juga membutuhkan biaya investasi yang cukup besar.

E. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi dan mengurangi permasalahan dan kedala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepanya dengan cara:

1. Bekerja sama dengan PT. PLN (persero) untuk merelokasi mesin genset yang telah ada untuk dioperasikan di daerah yang belum berlistrik atau daerah yang belum mendapatkan layanan listrik 24 jam serta menyerahkan penggunaan dan pemeliharaan beberapa asset genset milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada PT. PLN (Persero) agar masyarakat mendapatkan layanan listrik yang lebih andal.
2. Akan mengusulkan pembangunan pembangkit EBT kepada Pemerintah Pusat dengan menggunakan sumber energi *primer local* yang tersedia sebagai sumber energi listrik di daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Akan melaksanakan bantuan pemasangan baru listrik (BPBL) sebanyak 460 unit yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

F. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Tabel 7.3.80 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Rasio Eletrifikasi Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	7.032.813.319,00	6.963.267.756,00	99,01
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	25.899.052.024,00	25.701.125.294,00	99,75
Total	**32.931.865.343,00**	**32.664.393.050,00**	99,18

Dari jumlah anggaran sebesar Rp32.931.865.343,00 terealisasi sebesar Rp32.664.393.050,00 atau 99,18%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp267.472.293,00 (0,8%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Rasio Elektrifikasi (100,4%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (99,18%) dengan efesiensi 1,2%.

7.3.5.13. Sasaran Peningkatan Pembangunan Konektivitas Antar Pulau dan Kawasan Pesisir

7.3.5.13.1. Persentase Jalan Kondisi Mantap



Jalan kondisi mantap dapat didefinisikan sebagai jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan. Secara harafiah jalan didefinisikan sebagai jalur di mana masyakarat mempunyai hak untuk melewatinya tanpa diperlukannya izin khusus. Persentase Jalan Kondisi mantap di Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Persentase Jalan Kondisi mantap pada Tahun 2025 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 81,11% dari target sebesar 81,10% dan terealisasi sebesar 100% .

Persentase jalan kondisi mantap adalah indikator terbaru setelah dilakukannya perubahan RPJMD 2021-2026 untuk menyesuaikan dengan capaian kinerja jalan kondisi mantap hasil survey kondisi jalan yang dilakukan setiap tahun oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dan menjadi dasar untuk digunakan sebagai usulan yang dilakukan setiap tahunnya ke Kementerian PU untuk mendapatkan dana Alokasi

Khusus (DAK) yang digunakan untuk meningkatkan kualitas jalan Provinsi di Kepulauan Riau.

Tabel 7.3.81 Status Ruas Jalan Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Panjang Ruas (KM)
1	Kota Tanjungpinang	78,97
2	Kabupaten Bintan	106,28
3	Kabupaten Lingga	163,93
4	Kabupaten Natuna	143,33
5	Kabupaten Karimun	79,71
6	Kabupaten Kepulauan Anambas	48,54
7	Kota Batam	0
Total Ruas jalan Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau		**620,76**

Sumber : Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Persentase Jalan Kondisi Mantap merupakan gabungan dari persentase jalan kondisi baik ditambah dengan jalan kondisi sedang serta formula perhitungan persentase jalan kondisi mantap adalah Panjang jalan kondisi mantap (503,510 km) dibandingkan dengan Total Ruas Jalan Provinsi di Kepulauan Riau (620,76 Km) sehingga didapatkan hasilnya 81,11%. Perhitungan kondisi jalan mantap berdasarkan pemetaan dari data dasar kondisi jalan tahun 2025 yang kegiatan surveynya dilakukan di akhir tahun 2024.

Tabel 7.3.82 Panjang Jalan Kondisi Mantap

Panjang jalan kondisi mantap (Baik + Sedang)	Panjang jalan provinsi keseluruhan	Persentase Capaian Kinerja (%)
503,51	620,76	81,11

Sumber : Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau

Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dapat dilihat dari indikator Persentase Jalan Kondisi Mantap di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kenaikan yang cukup menggembirakan. Realisasi Persentase Jalan Kondisi Mantap Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 81,11% dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 81,10% sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dalam kategori Sangat Baik.

Tabel 7.3.83 Capaian Persentase Jalan Kondisi Mantap

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Jalan Kondisi Mantap	81,10%	81,11%	100%

Sumber : Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau

Capaian kinerja persentase jalan mantap tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,24%. Dimana pada tahun 2024 peningkatan persentase jalan mantap sebesar 80,87% meningkat menjadi 81,11% pada tahun 2025. Peningkatan ini disebabkan oleh konsistennya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk

mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk meningkatkan kualitas Jalan Provinsi di Kepulauan Riau, Pengawasan yang juga dilakukan oleh pemerintah maupun kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya kualitas jalan sehingga masyarakat selalu melaporkan jika ada jalan yang kondisinya kurang baik agar ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Khususnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Grafik 7.3.46 Tren Peningkatan Persentase Jalan Kondisi Mantap



Sumber : Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau

Dapat dilihat pada tabel diatas, Persentase Jalan Kondisi Mantap Provinsi Kepulauan Riau meningkat setiap tahunnya, kondisi awal pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 terdapat peningkatan persentase dari 80,62% menjadi 81,11% dengan besaran penambahan persentase sebesar 0,49%. peningkatan persentase terkecil pada tahun 2023 dengan persentase capaian 0,09%.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja Persentase Jalan Kondisi Mantap di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 81,11% dengan target sebesar 81,26% sehingga capaian kinerja sebesar 99,82%.

Tabel 7.3.84 Capaian Persentase Jalan Kondisi Mantap

Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian
81,26%	81,11%	99,82%

Sumber : Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 – 2025 Lampiran II halaman 132, target untuk kemantapan jalan provinsi secara nasional pada tahun 2025 sebesar 71%. Realisasi kemantapan jalan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 81,11% dengan capaian realisasi sebesar 114,24%. Dengan capaian melebihi 100%, persentase jalan mantap Provinsi kepulauan Riau sudah melebihi target nasional.

Provinsi Kepulauan Riau dalam Persentase Jalan Kondisi Mantap di level nasional, dapat terlihat dalam grafik berikut:

Grafik 7.3.47 Perbandingan Persentase Jalan Kondisi Mantap Target Nasional & Provinsi



Sumber : Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau

E. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai kinerja didukung oleh faktor-faktor yang memengaruhi dalam meningkatkan ketercapaian indikator Persentase Jalan Kondisi Mantap Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, berikut adalah upaya-upaya yang dilaksanakan, yaitu:

1. Pendanaan yang Memadai: Anggaran yang cukup untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan adalah kunci utama. Tanpa dana yang memadai, proyek jalan tidak dapat berjalan dengan lancar.
2. Perencanaan yang Matang: Perencanaan yang komprehensif dan terstruktur sangat penting untuk memastikan setiap tahap proyek berjalan sesuai rencana.
3. Pengawasan dan Evaluasi: Pengawasan yang ketat serta evaluasi berkala terhadap proyek jalan memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai standar dan waktu yang ditetapkan.
4. Sumber Daya Manusia: Tenaga kerja yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang konstruksi jalan sangat penting untuk menjamin kualitas hasil akhir.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya melakukan upaya-upaya diatas, terdapat upaya lainnya yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja, yaitu:

1. Kerjasama dan Koordinasi: Kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, kontraktor, dan masyarakat, dapat mempercepat proses penyelesaian proyek jalan.
2. Selain itu faktor Teknologi dan Inovasi: Penggunaan teknologi modern dan metode inovatif dalam konstruksi dan pemeliharaan jalan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan.

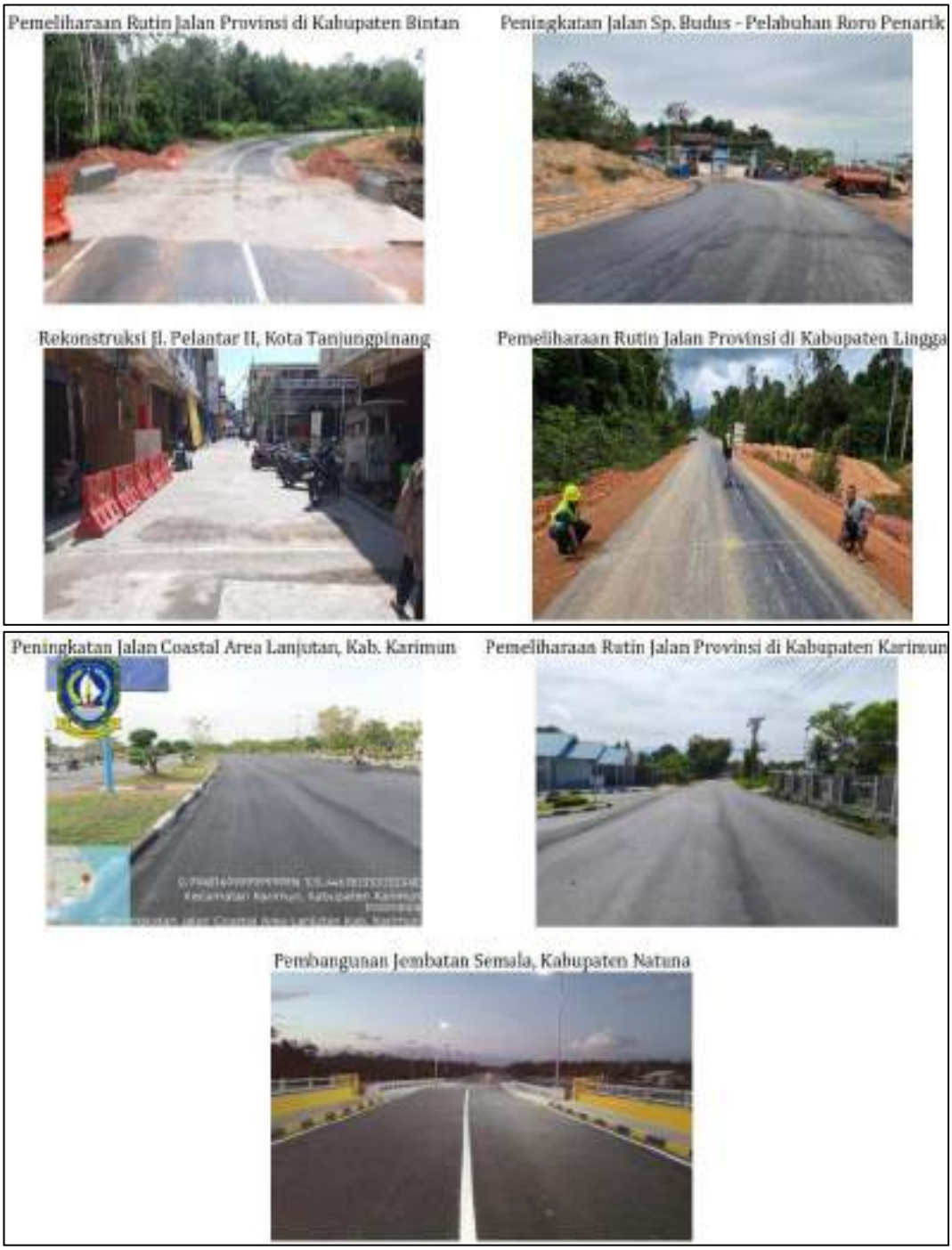
Adapun upaya spesifik yang dilakukan dalam mendukung ketercapaian indikator Jalan dalam kondisi mantap Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.3.85 Paket Pekerjaan yang mendukung Persentase Jalan Kondisi Mantap Provinsi Kepulauan Riau

NO	PAKET PEKERJAAN	SATUAN	PANJANG PENANGANAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN REALISASI
1	Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun	Km	0,3454	1.414.000.000,00	1.413.080.700,00	99,93
2	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan	Km	0,13	2.970.000.000,00	2.968.565.000,00	99,95
3	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Karimun	Km	0,148	580.000.000,00	572.383.400,00	-
4	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Lingga	Km	0,075	793.000.000,00	792.130.000,00	99,89
5	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas	Km	0,225	1.263.573.923,00	1.263.573.900,00	100,00
6	Pemeliharaan berkala jalan sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, kab. Karimun (DBH Sawit provinsi Kepri Lanjutan)	Km	0,265	1.041.000.000,00	1.020.216.400,00	98,00
7	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan	Km	0,6877	2.449.000.000,00	2.423.237.900,00	98,95
8	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Kota Tanjungpinang	Km	1,004	3.295.000.000,00	3.293.348.700,00	99,95
9	Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang	Km	0,0242	4.450.000.000,00	3.568.025.000,00	80,18
10	Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga	Km	0,261	1.520.000.000,00	1.519.999.300,00	100,00
11	Pembangunan Jembatan Semala, Kab Natuna	Jembatan	1	12.054.000.000,00	12.053.343.500,00	99,99
Total			**3,1653**	**31.829.573.923,00**	**30.887.903.800,00**	**97,04**

Sumber : Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau





Gambar 7.3.7 Pekerjaan Jalan di Provinsi Kepri Tahun 2025

Dalam pelaksanaan terdapat permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Persentase Jalan Kondisi Mantap, sebagai berikut:

1. Anggaran Terbatas: Anggaran yang terbatas sering kali menjadi hambatan utama dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan. Biaya yang tinggi untuk material, tenaga kerja, dan peralatan bisa sulit terpenuhi dengan anggaran yang ada.

2. Kualitas Material dan Pelaksanaan: Penggunaan material yang berkualitas rendah dan pelaksanaan yang tidak sesuai standar dapat mengakibatkan jalan cepat rusak. Pembangunan jalan yang tidak sesuai spesifikasi juga bisa menyebabkan jalan cepat berlubang atau retak.
3. Pengaruh Cuaca dan Kondisi Alam: Cuaca ekstrem seperti hujan deras, banjir, dan tanah longsor dapat merusak jalan dengan cepat. Kondisi geografis yang sulit, seperti pegunungan atau daerah rawan bencana, juga menyulitkan pembangunan jalan yang mantap.

F. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan persentase jalan mantap dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi di tahun-tahun selanjutnya, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepanya dengan cara:

1. Pemeliharaan Rutin: Menganggarkan dan Melakukan pemeliharaan jalan secara rutin agar mencegah kerusakan yang lebih parah. Ini termasuk penambalan lubang, perbaikan permukaan jalan, dan penggantian lapisan aspal.
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur: Menggunakan material berkualitas tinggi dan teknologi canggih dalam pembangunan jalan agar lebih tahan lama dan mampu menahan beban berat.

G. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

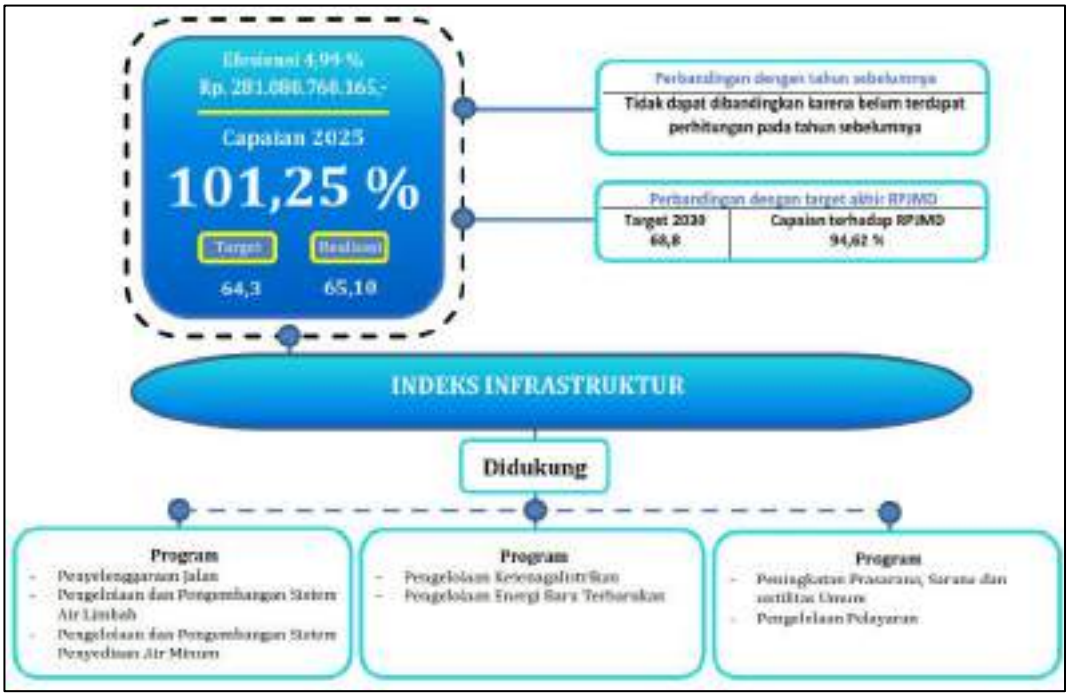
Tabel 7.3.86 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Persentase Jalan Kondisi Mantap Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Penyelenggaraan Jalan	49.854.264.462,00	44.032.581.032,00	88,32
Total	**49.854.264.462,00**	**44.032.581.032,00**	**88,32**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp49.854.264.462,00 terealisasi sebesar Rp44.032.581.032,00 atau 88,32%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp5.821.683.430,00 (11,68%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Persentase Jalan Kondisi Mantap (100%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (88,32%) dengan efesiensi 11,68%.

7.3.5.14. Sasaran Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Kewilayahan yang Terintegrasi, Strategi dan Memiliki Daya ungkit

7.3.5.14.1. Indeks Infrastruktur



Indeks infrastruktur adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan dan kualitas infrastruktur di suatu wilayah atau sektor tertentu. Indeks ini biasanya dihitung berdasarkan berbagai indikator yang mencerminkan ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi. Indeks. Indeks Infrastruktur pada Tahun 2025 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 101,25% dari target sebesar 64,3 Indeks dan terealisasi sebesar 65,10 Indeks.

Indeks Infrastruktur merupakan ukuran komprehensif yang digunakan untuk menilai tingkat ketersediaan, kualitas, dan keterjangkauan berbagai fasilitas dasar yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Indeks ini mencakup berbagai komponen seperti transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih, sanitasi, hingga infrastruktur sosial seperti sekolah dan fasilitas kesehatan. Melalui pengukuran yang sistematis, Indeks Infrastruktur memberikan gambaran objektif mengenai seberapa baik suatu wilayah mampu menyediakan layanan dasar bagi penduduknya.

Sebagai indikator penting pembangunan, Indeks Infrastruktur membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi kesenjangan antar wilayah. Wilayah dengan indeks yang tinggi umumnya memiliki jaringan transportasi yang memadai, akses listrik yang stabil, konektivitas digital yang baik, serta layanan publik yang mudah dijangkau. Sebaliknya, daerah dengan indeks rendah biasanya menghadapi keterbatasan yang berdampak pada produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat.

Pemanfaatan Indeks Infrastruktur sangat strategis dalam perencanaan pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan memahami kondisi aktual infrastruktur, pemerintah dapat menyusun prioritas investasi yang lebih tepat sasaran, mendorong pemerataan pembangunan, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya. Selain itu, indeks ini juga menjadi alat evaluasi untuk mengukur progres pembangunan dari waktu ke waktu sehingga strategi yang diterapkan dapat terus disempurnakan sesuai kebutuhan daerah dan dinamika pembangunan nasional.

Adapun dasar hitungan dalam menentukan capaian indeks infrastruktur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.3.87 Dasar Perhitungan Indeks Infrastruktur

Indikator Tujuan/Sasaran	Bobot nilai	Target 2025	Perangkat Daerah
Air Minum (Akses Air Minum Aman)	0,3634	26,75	DPUPP
Persentase Jalan Kondisi Mantap	0,3366	81,1	DPUPP
Sanitasi (Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman)	0,4889	7,76	DPUPP
Listrik (Rasio Elektrifikasi)	0,5166	98,8	Dinas ESDM
Telekomunikasi (Kualitas Sinyal Telepon dan Sinyal Internet)	0,4987	100	DISKOMINFO
Indeks Infrastruktur (Indeks)		**64,3**	**DPUPP, Dinas ESDM, dan DISKOMINFO**

Sumber : Data Bersama diolah DPUPP, Dinas ESDM dan DISKOMINFO

Dasar perhitungan penentuan realisasi capaian indeks infrastruktur yaitu (indikator air minum aman (bobot x realisasi) + jalan mantap (bobot x realisasi) + sanitasi aman (bobot x realisasi) + rasio elektrifikasi (bobot x realisasi) + telekomunikasi (bobot x realisasi)) / 2 = Capaian Indeks Infrastruktur.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Kewilayahan yang terintegrasi, strategis dan memiliki daya ungkit dapat dilihat dari indikator Indeks Infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kenaikan yang cukup menggembirakan. Realisasi Indeks Infrastruktur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 65,10 indeks dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 64,3 indeks sehingga capaian kinerja sebesar 101,25% atau dalam kategori “Sangat Baik.”

Tabel 7.3.88 Capaian Indeks Infrastruktur

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Infrastruktur	64,3 Indeks	65,10 Indeks	101,25%

Sumber : Data Bersama diolah DPUPP, Dinas ESDM dan DISKOMINFO

Dalam penentuan capaian indeks infrastruktur terdiri dari 5 indikator, dengan bobot paling tinggi berada pada rasio elektrifikasi sebesar 0,5166. Terdapat 2 indikator yang tidak mencapai target pada tahun 2025 hal ini dikarenakan indikator air minum aman dan sanitasi

aman membutuhkan data dukung dari kabupaten/kota. Pada indikator listrik (Rasio Elektrifikasi) juga masih menggunakan data capaian pada Triwulan III, untuk capaian sampai dengan Triwulan IV masih menunggu rekon dengan Kementerian.

Tabel 7.3.89 Perhitungan Indeks Infrastruktur

Indikator Tujuan/Sasaran	Bobot nilai	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian Target (%)
Air Minum (Akses Air Minum Aman)	0,3634	26,75	4,07	15,21
Persentase Jalan Kondisi Mantap	0,3366	81,1	81,11	100
Sanitasi (Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman)	0,4889	7,76	0,85	11
Listrik (Rasio Elektrifikasi)	0,5166	98,8	99,21	100
Telekomunikasi (Kualitas Sinyal Telepon dan Sinyal Internet)	0,4987	100	99,77	99,77
Indeks Infrastruktur (Indeks)		**64,3**	**65,1**	**101,25**

Sumber : Data Bersama diolah DPUPP, Dinas ESDM dan DISKOMINFO

Indeks Infrastruktur Provinsi Kepulauan Riau merupakan indikator baru yang terbentuk berdasarkan RPJMD tahun 2025 – 2029 sehingga indeks infrastruktur belum bisa dilihat perbandingan berdasarkan realisasi pada tahun sebelumnya.

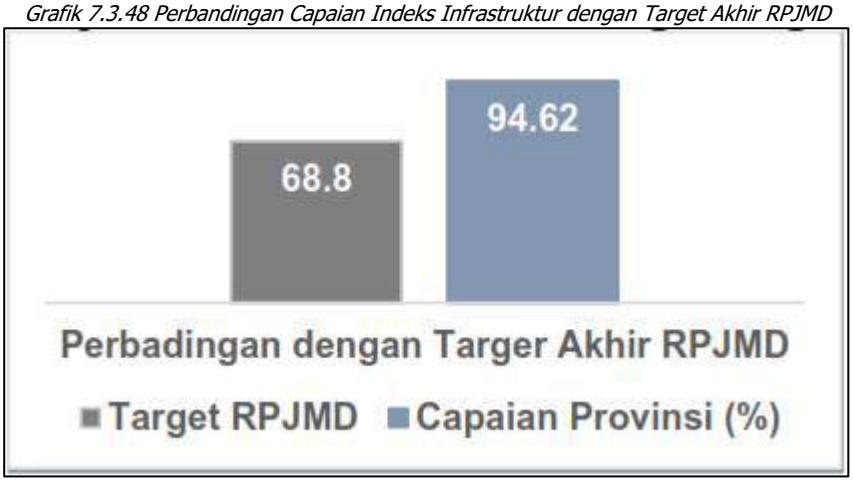
Capaian kinerja pada tahun 2025 belum bersifat final karena beberapa indikator pendukung indeks infrastruktur masih menunggu data capaian dari Kabupaten/Kota seperti indikator sanitasi aman, air minum aman, dan elektrivikasi yang belum melakukan rekon dengan Kementerian.

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Tidak dapat dibandingkan karena belum terdapat perhitungan pada tahun sebelumnya.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Grafik 7.3.48 Perbandingan Capaian Indeks Infrastruktur dengan Target Akhir RPJMD



Sumber : Data Bersama diolah DPUPP, Dinas ESDM dan DISKOMINFO

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja Indeks Infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 65,10

indeks dengan target sebesar 68,8 indeks sehingga capaian kinerja sebesar 94.62%. Berdasarkan grafik diatas bahwa realisasi tahun 2025 berbanding dengan target akhir RPJMD memiliki capaian sebesar 94,62%. Capaian realisasi masih bisa bertambah mengingat tahun 2025 merupakan tahun pertama pada RPJMD 2025 – 2029.

D. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai kinerja didukung oleh faktor-faktor yang memengaruhi dalam meningkatkan ketercapaian indikator Indeks Infrastruktur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, berikut adalah upaya-upaya yang dilaksanakan, yaitu:

1. Peningkatan dan pemerataan pembangunan, terutama terkait konektivitas antar wilayah. Jalan dan Jembatan merupakan kunci utama dalam membangun konektivitas. Pembangunan jembatan menghubungkan wilayah yang terpisah oleh rintangan alam seperti sungai atau lembah, yang secara drastis memangkas waktu tempuh. konektivitas bukan hanya jalan, namun juga kualitas dari jalan tersebut, pemeliharaan berkala jalan provinsi yang sudah ada dapat memperlancar distribusi logistik. Pada tahun 2025 Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan beberapa pekerjaan terkait konektivitas antara lain:

Tabel 7.3.90 Data Pemerataan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Paket Kegiatan	Satuan	Panjang Penanganan
1	Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun	Km	0,3454
2	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan	Km	0,13
3	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Karimun	Km	0,148
4	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Lingga	Km	0,075
5	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas	Km	0,225
6	Pemeliharaan berkala jalan sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, kab. Karimun (DBH Sawit provinsi Kepri Lanjutan)	Km	0,265
7	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan	Km	0,6877
8	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Kota Tanjungpinang	Km	1,004
9	Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang	Km	0,0242
10	Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga	Km	0,261
11	Pembangunan Jembatan Semala, Kabupaten Natuna	Jembatan	1

Sumber : Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau

4. Infrastruktur trasnportasi berfungsi sebagai urat nadi, yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi, membuka isolasi wilayah, dan mempercepat distribusi barang dan mobilitas manusia. Pembangunan pelabuhan berfungsi sebagai titik simpul yang menghubungkan pusat produksi dengan konsumsi merupakan desain

pengembangan wilayah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Perhubungan pada tahun 2025 memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan sebagai titik simpul konektivitas. Pelabuhan yang dibangun dan dipelihara adalah:

a. Pembangunan Pelabuhan Rakyat Kp. Beko Kasu Batam

b. Pengadaan dan Pemasangan Ponton HDPE Pelabuhan Jagoh Kab. Lingga

c. Rehap Pelabuhan Tanjung Buton Kab. Lingga

Pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan ini diharapkan mampu menjamin aksesibilitas logistik tetap terjaga meski di wilayah terpencil. Peningkatan kapasitas infrastruktur pelabuhan baik melalui pembangunan dan pemeliharaan mamupu mengurangi hambatan waktu dan biaya logistik yang kemudian menstimulus pertumbuhan ekonomi wilayah. Pembangunan pelabuhan bukan hanya soal fisik dermaga, melainkan tentang membangun ekosistem yang terkoneksi.



Gambar 7.3.8 Pembangunan dan Pemeliharaan Pelabuhan Provinsi Kepri Tahun 2025

5. Penguatan Regulasi pada sektor infrastruktur, Untuk mendukung terwujudnya air minum aman dan sanitasi aman di Kepulauan Riau, Pemerintah berkomitmen dengan cara telah dibuat Roadmap Air Minum melalui Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2025 – 2030. Pemerintah Provinsi juga telah menyusun Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029 yang menargetkan peningkatan persentase sanitasi aman di Provinsi Kepulauan Riau.

6. Perkuatan infrastruktur terkait telekomunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital seperti perluasan jaringan kabel, nirkabel, satelit dan terutama penguatan jaringan 4G LTE yang merata meningkatkan aksesibilitas secara signifikan.

7. Terlaksananya program ketenagalistrikan seperti kegiatan Bantuan Penyambungan Listrik (BPBL) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi bagi Rumah Miskin di wilayah Kabupaten Karimun dan Kota Batam dan kegiatan pemeliharaan mesin genset yang akan di operasikan oleh PT. PLN (Persero) serta adanya kegiatan

penambahan pembangunan ketenagalistrikan dari PT. PLN (Persero) di beberapa daerah di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 7.3.9 Pemasangan Bantuan Penyambungan Listrik

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya melakukan upaya-upaya diatas, terdapat upaya lainnya yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja, yaitu:

1. Perbaikan prasarana, sarana, dan untilitas umum mendukung penguatan infrastruktur yang berkelanjutan dan berdaya saing. Prasarana yang memadai, seperti jaringan jalan, jembatan, dan drainase, berperan penting dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah serta memperlancar mobilitas orang dan barang, ketersediaan sarana pendukung yang layak akan mendorong kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan kualitas hidup.
2. Penguatan koordinasi antar instansi dan pemerintah daerah terutama dalam hal standar.
3. Mendorong Peran aktif dari pemilik wilayah usaha ketenagalistrikan, peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.
4. Pemasangan genset dengan Lokasi Pemasangan di Pulau Nuja Kab. Lingga sebanyak 1 unit, di Pulau Bahan Kab. Karimun sebanyak 1 unit.

Dalam pelaksanaan terdapat permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Indeks Infrastruktur, sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran dan biaya pembangunan yang tinggi

   Tantangan membangun infrastruktur pada Provinsi Kepulauan Riau jauh lebih mahal dibandingkan di daratan karena kendala logistik antar pulau. Adanya komitmen terkait air minum aman, sanitasi aman, dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berbasis energi bersih membutuhkan pembiayaan baik dari segi APBD dan investasi lain yang cukup besar.
2. Ketimpangan akses dan kondisi geografis yang menantang

Provinsi Kepulauan Riau memiliki ribuan pulau dengan pemukiman yang banyak berdiri di atas air atau di pesisir pantai sehingga dari segi aspek sanitasi, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) masih sangat terbatas dan belum menjangkau seluruh kawasan padat penduduk seperti di Batam atau Tanjungpinang secara menyeluruh. Hal ini juga didukung belum semua Kabupaten/Kota memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang beroperasi secara optimal.

3. Keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas teknis

   Dari sisi kelistrikan, rumah tangga yang berada pada pulau-pulau kecil masih tersebar dengan jumlah rumah tangga yang terbatas. Untuk mendukung ketercapaian air minum aman, tantangan kabupaten/kota adalah memastikan air tersebut mengalir 24 jam dan kualitasnya teruji secara laboratorium. Banyak wilayah di Kepulauan Riau yang aliran airnya masih bergilir (tidak 24 jam).

4. Target yang terlalu tinggi sehingga capaian target tidak tercapai

   Penentuan target harus menyesuaikan pada kemampuan daerah, mengingat pada tahun 2025 dan 2026 Provinsi Kepulauan Riau defisit anggaran, untuk itu target yang terlalu tinggi akan merugikan masing-masing OPD pendukung dari indeks infrastruktur.

E. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan Indeks Infrastruktur dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi di tahun-tahun selanjutnya, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepanya dengan cara:

1. Peningkatan integrasi jenis infrastruktur, Melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau akan Bekerja sama dengan PT. PLN (persero) untuk merelokasi mesin genset yang telah ada untuk dioperasikan di daerah yang belum berlistrik atau daerah yang belum mendapatkan layanan listrik 24 jam serta menyerahkan penggunaan dan pemeliharaan beberapa asset genset milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada PT. PLN (Persero) agar masyarakat mendapatkan layanan listrik yang lebih andal. Selanjutnya akan mengusulkan pembangunan pembangkit EBT kepada Pemerintah Pusat dengan menggunakan sumber energi *primer local* yang tersedia sebagai sumber energi listrik di daerah Provinsi Kepulauan Riau dan akan melaksanakan bantuan pemasangan baru listrik (BPBL) sebanyak 460unit yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau

2. Melakukan pemeliharaan jalan secara rutin agar mencegah kerusakan yang lebih parah. Ini termasuk penambalan lubang, perbaikan permukaan jalan, dan penggantian lapisan aspal pada Kabupaten/Kota berdasarkan hasil survei jalan mantap.

3. Koordinasi antar pemerintah daerah dan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk peningkatan kualitas layanan seperti berkoordinasi dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mendata dan membangun BTS (*Base Transceiver Station*) di

wilayah-wilayah yang sudah terjangkau sinyal seluler namun dilakukan upaya peningkatan menjadi tersedianya sinyal internet.

4. Melakukan pendampingan pada 7 kabupaten/kota terkait percepatan pembangunan sanitasi permukiman untuk mencapai target sanitasi aman di Provinsi Kepulauan Riau.
5. Melakukan pengadaan dan pemasangan pipa JDU di Jl Raja Haji Fisabilillah Kota Tanjungpinang bertujuan untuk memperkuat sistem distribusi air bersih dari sumber atau pusat pengolahan ke masyakarat.

F. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

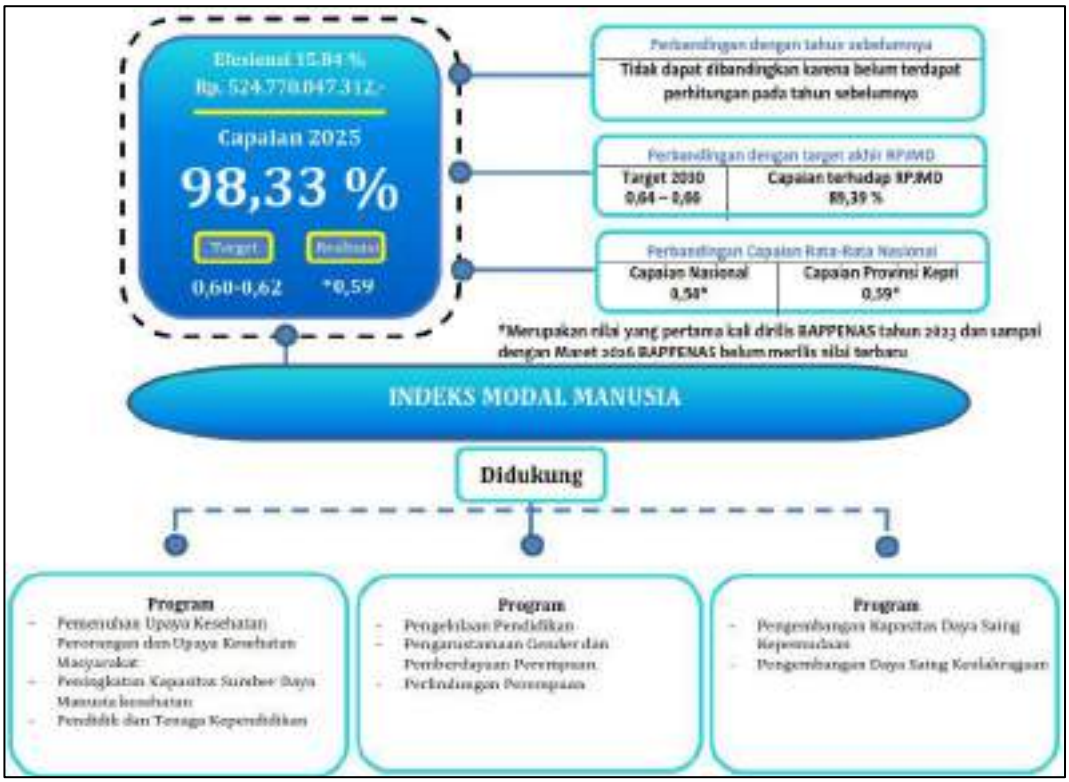
Tabel 7.3.91 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Indeks Infrastruktur Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Penyelenggaraan Jalan	49.854.264.462,00	44.032.581.032,00	88,32
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	105.381.749,00	87.439.665,00	88,97
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minumn	1.504.353.910,00	1.490.316.311,00	99,07
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	7.032.813.319,00	6.963.267.756,00	99,01
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	25.899.052.024,00	25.701.125.294,00	99,24
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Untilitas Umum	188.526.981.428,00	187.972.550.830,00	99,7
Program Pengelolaan Pelayaran	8.157.913.273,00	4.322.596.278,00	52,99
Total	**281.080.760.165,00**	**270.569.877.166,00**	**96,26**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp281.080.760.165,00 terealisasi sebesar Rp270,569,877,166,00 atau 96,26%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp10.510.882.999,00 (3,74%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Indeks Infrastruktur (101,25%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (96,26%) dengan efesiensi 4,99%.

7.3.5.15. Sasaran Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul

7.3.5.15.1. Indeks Modal Manusia



Indeks Modal Manusia adalah menghitung kontribusi kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas pekerja. Skor indeks akhir berkisar dari 0 hingga 1 dan mengukur produktivitas sebagai pekerja masa depan dari anak yang lahir hari ini relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap. Indeks Modal Manusia adalah pendekatan yang dilakukan oleh World Bank (Human Capital Index). Indeks Modal Manusia pada Tahun 2025 menggunakan data Tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 0,59 Indeks dari target sebesar 0,60-0,62 Indeks (menggunakan target terendah) dan terealisasi sebesar 98,33%.

Indeks Modal Manusia merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia melalui aspek kesehatan, pendidikan, dan keterampilan yang dimiliki penduduk. Indeks ini menggambarkan kemampuan suatu populasi untuk berkontribusi secara produktif dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan sosial. Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar potensi masyarakat untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan.

Indeks Modal Manusia tidak hanya menilai tingkat pendidikan formal, tetapi juga kualitas pembelajaran, rata-rata lama sekolah, serta kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi perubahan dunia kerja. Dari sisi kesehatan, indikator ini memperhitungkan kualitas gizi, harapan hidup, serta kemampuan individu untuk menjalani aktivitas produktif sepanjang hidup. Dengan demikian, indeks ini memberikan gambaran menyeluruh tentang seberapa siap suatu generasi dalam berkompetisi di tingkat nasional maupun global.

Pemerintah dan pemangku kepentingan sering memanfaatkan Indeks Modal Manusia sebagai dasar perencanaan kebijakan pembangunan. Hasil pengukuran indeks ini membantu mengidentifikasi tantangan utama seperti rendahnya akses pendidikan, tingginya angka stunting, atau kualitas pelatihan kerja yang belum memadai. Dengan fokus peningkatan pada aspek-aspek tersebut, pembangunan modal manusia dapat berlangsung lebih optimal sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan daya saing daerah maupun negara.

Indeks modal manusia diukur melalui beberapa komponen utama:

1. Probabilitas bertahan hidup (survival) hingga usia 5 tahun: Probabilitas bahwa seorang anak yang baru lahir akan bertahan hingga usia 5 tahun. Data dihitung dari angka kematian balita.
2. Pendidikan: Akses pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah. Kualitas pendidikan diukur melalui *harmonized test scores*. Data akses dan kualitas pendidikan ditransformasikan menjadi pengukuran *Learning-Adjusted Years of Schooling* menggunakan metrik konversi.
3. Kesehatan: Mencakup berbagai indikator kesehatan, termasuk stunting, yang merupakan kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat karena malnutrisi kronis. 2 proksi yang digunakan adalah (1) *adult survival rate* yang didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia 15 tahun yang hidup hingga 60 tahun; dan (2) prevalensi stunting.

Komponen-komponen ini digabungkan untuk menghasilkan skor Indeks Modal Manusia, yang berkisar dari 0 hingga 1. Skor ini mengukur produktivitas tenaga kerja di masa depan dari anak yang dilahirkan saat ini, relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap.

Komponen-komponen tersebut dapat dihitung dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Survival dihitung dari angka kematian balita (SUPAS dan LF SP).
2. Pendidikan: Akses pendidikan tetap diukur melalui harapan lama sekolah, namun untuk kualitas pendidikan, *harmonized test scores* diukur melalui proksi hasil asesmen pendidikan yang dilaksanakan di tingkat nasional dan daerah. Data akses dan kualitas pendidikan ditransformasikan menjadi pengukuran *Learning-Adjusted Years of Schooling* menggunakan metrik konversi.
3. Kesehatan dihitung dari data *adult survival rate* (SUPAS dan LF SP) yang diagregasi pada usia 15- 60 dan prevalensi stunting (SSGI dan SKI)

Konversi ketiga komponen menjadi Indeks Modal Manusia dilakukan menggunakan pendekatan yang dilakukan *World Bank*.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul dapat dilihat dari indikator Indeks Modal Manusia di Provinsi Kepulauan Riau hasil yang baik. Realisasi Indeks Modal Manusia Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 dengan menggunakan data tahun 2023

sebesar 0,59 indeks dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 0,60-0,62 indeks (menggunakan target terendah) sehingga capaian kinerja sebesar 98,33% atau dalam kategori “Baik”.

Tabel 7.3.92 Capaian Indeks Modal Manusia

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Modal Manusia	0,60 – 0,62 Indeks	0,59 Indeks	98,33%

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kepri

Capaian realisasi Indeks Modal Manusia menggunakan nilai tahun 2023, hal ini disebabkan belum selesainya proses penilaian oleh BAPENAS RI.

Survival dihitung dari angka kematian balita (AKB), berdasarkan laporan rutin program sampai dengan bulan November 2025 diperoleh jumlah kematian Bayi sebanyak 290 kasus dari 28.474 KH. Apabila dikonversikan menjadi Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi sebesar 10,2 per 1.000 kelahiran hidup.

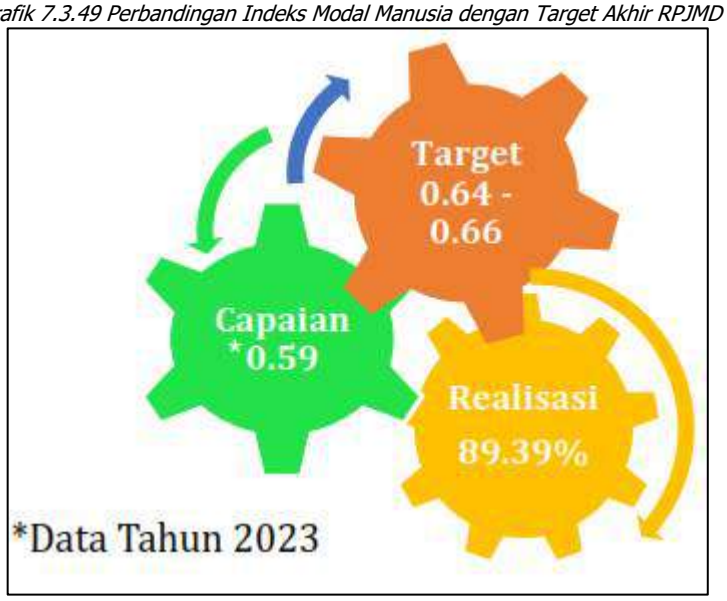
B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Tidak dapat dibandingkan karena belum terdapat perhitungan pada tahun sebelumnya.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja Indeks Modal Manusia di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0.59 indeks dengan target sebesar 0.64 – 0,66 indeks (menggunakan target tertinggi) sehingga capaian kinerja sebesar 89,39%.

Grafik 7.3.49 Perbandingan Indeks Modal Manusia dengan Target Akhir RPJMD

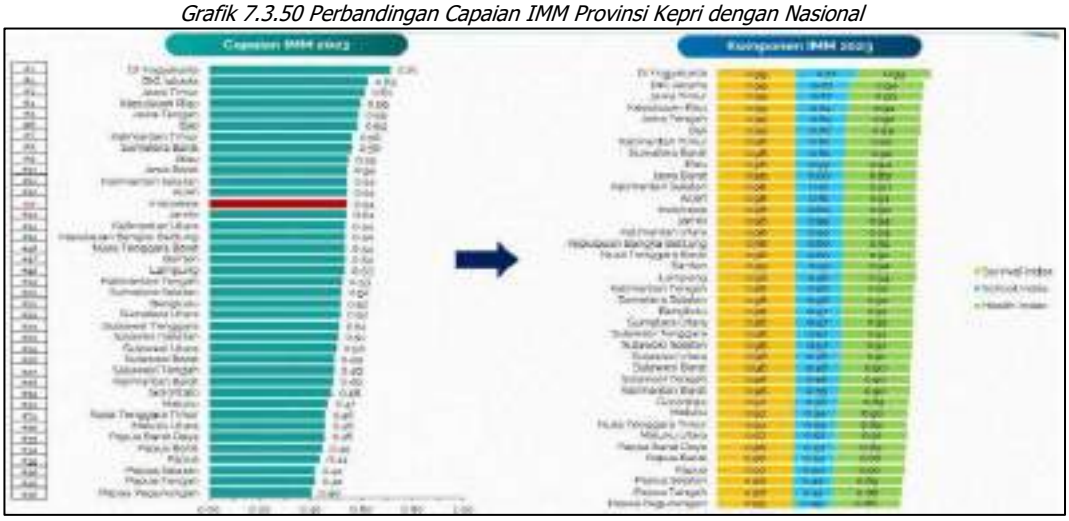


Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kepri

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Capaian Indeks Modal Manusia Provinsi Kepulauan Riau dibandingan dengan target nasional pada Tahun 2025 menggunakan data Tahun 2023 berada diatas target nasional yaitu rata-rata nasional sebesar 0,54 Indeks dengan capaian Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,59 Indeks.

Grafik 7.3.50 Perbandingan Capaian IMM Provinsi Kepri dengan Nasional



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas RI

E. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai kinerja didukung oleh faktor-faktor yang memengaruhi dalam meningkatkan ketercapaian indikator Indeks Modal Manusia Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, berikut adalah upaya-upaya yang dilaksanakan, yaitu:

1. Dari Komponen Probabilitas bertahan hidup melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:
    a. Melaksanakan desiminasi hasil pelaksanaan AMPSR di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota sebagai bahan pembelajaran agar kasus kematian serupa tidak terjadi lagi dan AMPSR dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.
    b. Berkolaborasi dengan organisasi profesi seperti IBI, IDAI, dan POGI dalam melakukan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam pemberian pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk pelayanan reproduksi.
    c. Melaksanakan bimbingan teknis pelayanan kesehatan ibu dan anak ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan puskesmas.
    d. Melakukan *feedback* data program pelayanan kesehatan ibu dan anak secara berkala.
2. Dari Komponen Pendidikan melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:
    a. Perluasan akses pendidikan sejak usia dini, melalui peningkatan layanan PAUD hingga pendidikan menengah

b. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di wilayah terpencil, pesisir, dan pulau-pulau
c. Penguatan program wajib belajar 12 tahun, termasuk dukungan pembiayaan dan regulasi daerah
d. Optimalisasi bantuan pendidikan (BOS, PIP/KIP, dan beasiswa daerah) agar tepat sasaran dan berkelanjutan
e. Peningkatan kualitas dan distribusi pendidik, khususnya di daerah kepulauan dan perbatasan
f. Pengembangan pendidikan nonformal dan kesetaraan, sebagai jalur alternatif bagi masyarakat
g. Pemanfaatan teknologi pembelajaran, untuk menjangkau peserta didik di wilayah sulit akses
h. Peningkatan peran orang tua dan masyarakat, melalui kampanye kesadaran pentingnya pendidikan jangka Panjang
i. Penguatan kolaborasi lintas sektor, antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat
j. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan praktis seperti tata boga dan menjahit bagi perempuan dalam upaya pemningkatan kualitas keluarga untuk meningkatkan sumbangan pendapatan perempuan dalam ekonomi keluarga dan penyelenggaraan sekolah Perempuan paket C bagi Perempuan kelompok rentan yang putus sekolah.
k. Optimalisasi program Pemilihan Pemuda Pelopor mulai dari tingkat desa, daerah, hingga nasional.
l. Penajaman indikator kepeloporan agar lebih berdampak dan berkelanjutan
m. Pelaksanaan pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan inovasi sosial berbasis kebutuhan zaman.
n. Penguatan literasi digital, teknologi, dan green skills bagi pemuda.
o. Pendampingan intensif bagi calon dan penerima Pemuda Pelopor.
p. Pengembangan inkubator ide dan usaha pemuda berbasis potensi lokal.
q. Penguatan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas pemuda.
r. Pelibatan Pemuda Pelopor dalam program pembangunan daerah
s. Promosi dan publikasi kiprah Pemuda Pelopor melalui media sosial dan *platform* digital.
t. Pemanfaatan teknologi untuk memperluas dampak gerakan kepeloporan.
u. Penguatan pembinaan atlet usia dini secara berjenjang dan berkelanjutan.
v. Pemanduan bakat yang lebih sistematis melalui sekolah dan klub olahraga.

w. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi pelatih, wasit, dan tenaga pendukung.

x. Pemberian insentif dan penghargaan berbasis prestasi.

3. Dari Komponen Kesehatan melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait penyediaan akses air bersih dan sanitasi.

b. Setiap keluarga miskin harus memiliki Jaminan Sosial berupa KIS (Kartu Indonesia Sehat)

c. Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana terkait layanan kesehatan dan KB

d. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

e. Optimalisasi pemanfaatan/Konsumsi Pangan Sayur, Buah dan Protein bersumber hewani kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan

f. Kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan melalui program ketahanan pangan dan gizi.

g. Meningkatkan konsumsi Ikan melalui Program Gemarikan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan

h. Bekerjasama dengan PKK Provinsi Kepulauan Riau melalui program pemberian bantuan paket Balita beresiko stunting dan *wasting* kepada Balita beresiko masalah gizi di Kabupaten Bintan, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang

i. Revitalisasi dan pemeliharaan fasilitas olahraga sesuai standar.

j. Pemerataan akses sarana latihan dan pertandingan di daerah.

k. Penyusunan program latihan berbasis data dan periodisasi yang tepat.

l. Penyelenggaraan kompetisi yang rutin, berjenjang, dan berkualitas.

m. Penguatan manajemen organisasi cabang olahraga yang profesional dan transparan.

n. Peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan olahraga.

o. Optimalisasi anggaran yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

p. Meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

F. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan Indeks Modal Manusia dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi di tahun-tahun selanjutnya, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepanya dengan cara:

1. Dari Komponen Probabilitas bertahan hidup, sebagai berikut:

    a. Mengusulkan pengadaan buku KIA sebagai media KIE melalui anggaran APBD/P;

    b. Melengkapi sarana prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau puskesmas dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi. Salah satunya yaitu logistik pemeriksaan laboratorium bagi ibu, bayi, dan calon pengantin, alat stabilisasi ibu dan bayi dengan komplikasi, fasilitas dalam ambulans sebagai sarana rujukan kegawatdaruratan;

    c. Optimalisasi sistem rujukan penanganan kasus komplikasi pada ibu dan bayi melalui optimalisasi grup komunikasi online yang melibatkan fasyankes tingkat pertama, fasyankes rujukan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta penyusunan SOP sistem rujukan kesehatan ibu dan anak, termasuk di dalamnya penunjukan dokter spesialis kandungan dan anak sebagai penanggujawab wilayah yang memberikan arahan kepada tenaga kesehatan di wilayah kerja puskesmas untuk stabilisasi pasien ibu dan bayi sebelum merujuk;

    d. Melakukan kegiatan Audit Maternal Periatal (AMP) sebagai proses pembelajaran kasus kematian ibu dan bayi agar tidak terulang lagi dengan kasus yang sama. Perencanaan kegiatan AMP di tingkat kabupaten/ kota harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu minimal 4 kali dalam setahun dan semua kasus dikaji. AMP tetap harus dilakasanakan meskipun tidak ada kasus kematian yang terjadi. Pelaksanaan AMP dapat diselenggarakan menggunakan dana DAK Fisik Kabupaten/ Kota dengan menu Surveilans dan Tatalaksana Kesehatan Ibu dan Bayi;

    e. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi. Beberapa diantaranya yaitu pelatihan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, pelatihan integrasi Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan gizi buruk, pelatihan penanganan asfiksia dan BBLR, pelatihan dokter dalam pelayanan KIA termasuk penggunaan USG, pelatihan bidan dalam pelayanan KIA, dan pelatihan lainnya;

    f. Peningkatan koordinasi dengan organisasi profesi (POGI, IBI, IDAI, dll) dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, salah satunya kolaborasi dengan IDAI dalam pelaksanaan *Pedistrician Social Responsibility* (PSR);

    g. Pelaksanaan *refreshing* deteksi risiko dini dan penapisan faktor risiko ibu dan bayi bagi bidan - bidan di wilayah kerja puskesmas;

    h. Penguatan peran lintas sektor dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan pemberdayaan masyarakat dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), salah satunya kolaborasi dengan Kementerian Agama terkait upaya pelayanan kesehatan reproduksi calon

pengantin dan menginisiasi penyusunan SE Gubernur terkait pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin;

i. Mendorong kabupaten/ kota dalam pembentukan jejaring, *skrining* layak hamil, ANC, dan stunting;

j. Optimalisasi dan monitoring pemanfaatan JKN, DAK, Dekonsentrasi untuk penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);

k. Melakukan advokasi kepada kepala daerah untuk pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

2. Dari Komponen Pendidikan, sebagai berikut:

   a. Pemerataan Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan USB, RKB, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan kegiatan pembangunan fisik pendidikan lainnya, khususnya di wilayah yang angka partisipasinya masih rendah.

   b. Melanjutkan program Pembebasan SPP, Pemberian Bantuan bagi siswa tidak mampu melalui bantuan transportasi darat dan laut, dan juga bantuan bagi siswa yang melaksanakan magang.

   c. Melakukan koordinasi secara terus menerus baik di internal Dinas Pendidikan, maupun dengan Instansi/lembaga terkait, serta pemerintah pusat dalam rangka mendorong pemenuhan SPM di bidang pendidikan khususnya jenjang menengah.

   d. Pengarusutamaan Gender (PUG): Penyelenggaraan sekolah Perempuan paket C bagi Perempuan kelompok rentan yang putus sekolah serta penguatan kelembagaan organisasi wanita.

3. Dari Komponen Kesehatan, sebagai berikut:

   a. Setiap ibu hamil sebelum usia kehamilan 3 bulan harus sudah periksa ANC agar bisa mencapai standar ANC 6x;

   b. Setiap ibu hamil minum Tablet Tambah Darah (TTD/MMS – Multivitamin Ibu Hamil) setiap hari selama kehamilan;

   c. Setiap Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) mendapatkan Makanan Tambahan Lokal selama 120 hari;

   d. Setiap ibu menyusui mendapatkan dukungan untuk bebas menyusui bayinya kapanpun;

   e. Setiap ibu menyusui yang bekerja mendapat fasilitas ruangan untuk memerah ASI di tempat kerja;

   f. Ada pengawasan terhadap bantuan produk pengganti ASI, hanya dapat diberikan atas petunjuk dokter;

   g. Setiap bayi lahir di fasilitas kesehatan;

h. Setiap bayi harus mendapatkan ASI saja selama 6 bulan;

i. Setiap bayi usia 6 bulan harus mulai diberi makanan padat kaya protein hewani (MP-ASI) dan ASI dilanjutkan sampai usia 2 tahun;

j. Setiap balita harus ditimbang sebulan sekali di Posyandu;

k. Setiap balita Berat Badan Tidak Naik (T) harus mendapat Makanan Tambahan Lokal selama 2 minggu;

l. Setiap balita Berat Badan Kurang mendapat Makanan Tambahan Lokal selama 4 minggu;

m. Setiap balita Gizi Kurang mendapat Makanan Tambahan Lokal selama 8 minggu;

n. Setiap balita Gizi Buruk mendapat tata laksana;

o. Setiap baduta mendapat imunisasi lengkap;

p. Setiap remaja putri kelas 7 dan kelas 10 di skrining anemia;

q. Setiap remaja putri anemia mendapat tata laksana;

r. Setiap remaja putri minum TTD satu tablet setiap minggu;

s. Setiap remaja putri melakukan cek kesehatan;

G. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

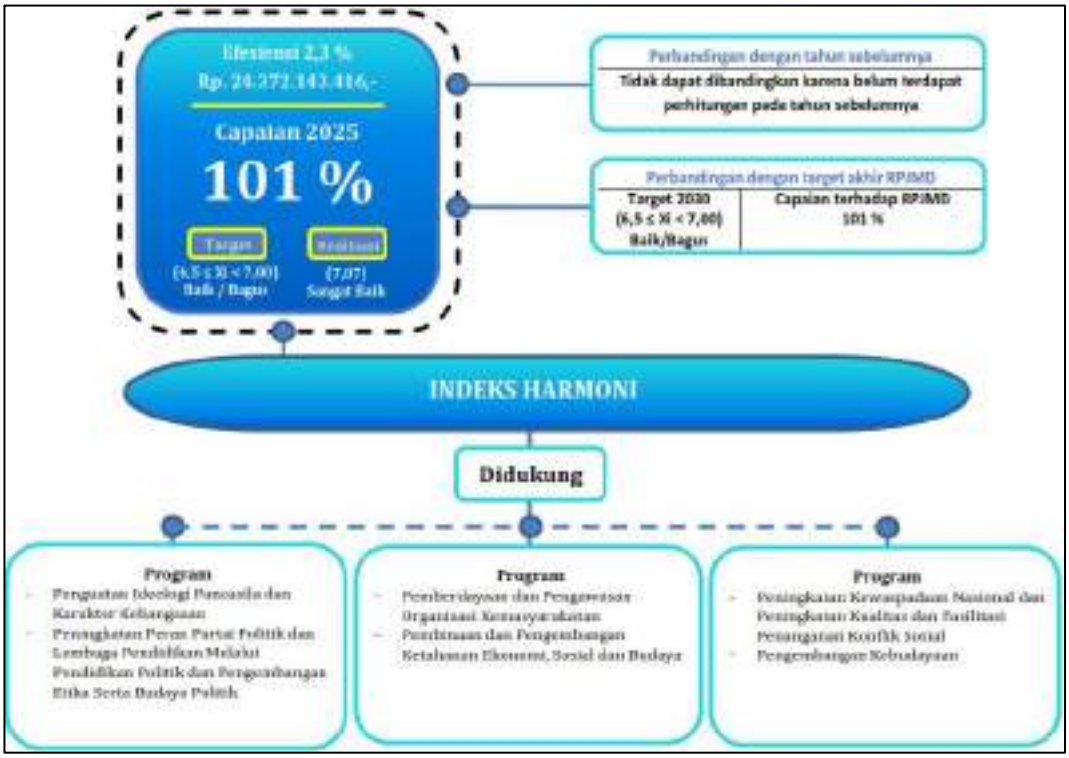
Tabel 7.3.93 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Indeks Modal Manusia Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Anggaran (%)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	44.437.498.341,00	41.258.918.621,00	92,85
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.237.113.827,00	10.219.702.669,00	99,83
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	187.656.000,00	153.676.514,00	81,89
Program Pengelolaan Pendidikan	365.322.687.666,00	302.664.866.696,00	82,85
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	786.089.915,00	691.593.745,00	87,98
Program Perlindungan Perempuan	84.395.865.464,00	60.230.280.160,00	71,37
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	838.857.400,00	564.859.622,00	67,34
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	18.564.278.699,00	17.106.633.538,00	92,15
Total	**524.770.047.312,00**	**432.890.531.565,00**	82,49

Dari jumlah anggaran sebesar Rp524.770.047.312,00 terealisasi sebesar Rp432.890.531.565,00 atau 82,49%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp91.879.515.747,00 (17,51%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Indeks Modal Manusia (98,33%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (82,49%) dengan efesiensi 15,84%.

7.3.5.16. Sasaran Meningkatkan Kehidupan Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

7.3.5.16.1. Indeks Harmoni



Indeks Harmoni adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keharmonisan sosial dalam suatu masyarakat melalui aspek toleransi, inklusivitas, interaksi sosial, serta rasa aman dan saling menghormati antarindividu maupun kelompok. Kementarian dalam Negeri pada Tahun 2025 hanya menilai Indeks Harmoni pada Kota Batam. Sehingga Indeks Harmoni Provinsi Kepulauan Riau menggunakan nilai Kota Batam,pada Tahun 2025 sudah baik dengan realisasi kinerja sebesar (7,07) Sangat Baik dari target sebesar (6,5 ≤ Xi < 7,00) Baik/Bagus (menggunakan target tertinggi) dengan capaian kinerja 101%.

Indeks Harmoni merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keharmonisan sosial dalam suatu masyarakat melalui penilaian terhadap toleransi, rasa aman, interaksi sosial, dan kemampuan masyarakat mengelola perbedaan. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas hubungan antarindividu maupun antarkelompok dalam suatu wilayah. Semakin tinggi nilai Indeks Harmoni, semakin baik pula kemampuan masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati.

Dalam penyusunannya, Indeks Harmoni biasanya didasarkan pada survei persepsi atau pengukuran langsung terhadap berbagai aspek sosial yang terkait dengan inklusivitas, solidaritas, serta potensi konflik. Indikator seperti keterbukaan terhadap keberagaman, kepercayaan antarwarga, hingga tingkat kriminalitas kerap menjadi komponen utama dalam perhitungan indeks ini. Dengan pendekatan tersebut, Indeks Harmoni tidak hanya

mengukur kondisi sosial saat ini, tetapi juga mencerminkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang.

Pemerintah dan pemangku kepentingan sering memanfaatkan Indeks Harmoni sebagai dasar perumusan kebijakan untuk menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Melalui pemantauan indeks ini, pihak terkait dapat mengidentifikasi potensi kerawanan sosial, menentukan program mitigasi konflik, serta memperkuat upaya pembinaan kerukunan antarwarga. Dengan demikian, Indeks Harmoni menjadi instrumen penting dalam mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan kondusif bagi pembangunan berkelanjutan.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Meningkatkan kehidupan beragama maslahat dan berkebudayaan maju dapat dilihat dari indikator Indeks Harmoni di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kenaikan yang cukup menggembirakan. Penilaian Indeks Harmoni Provinsi menggunakan nilai dari rata-rata dari Kabupaten/Kota yang berada di dalam suatu Provinsi, Kementarian dalam Negeri pada Tahun 2025 hanya menilai Indeks Harmoni pada Kota Batam. Sehingga Indeks Harmoni Provinsi Kepulauan Riau menggunakan nilai Kota Batam, Realisasi Indeks Harmoni Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar (7,07) Sangat Baik dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar (6,5 ≤ Xi < 7,00) Baik/Bagus (menggunakan target tertinggi) sehingga capaian kinerja sebesar 101% atau dalam kategori “Sangat Baik.”

Tabel 7.3.94 Capaian Indeks Harmoni

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Harmoni	(6,5 ≤ Xi < 7,00) Baik/Bagus	(7,07) Sangat Baik	101 %

Sumber : Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri 2025

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Tidak dapat dibandingkan karena belum terdapat perhitungan pada tahun sebelumnya.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja Indeks Harmoni di Provinsi Kepulauan Riau sebesar (7,07) Sangat Baik dengan target sebesar (6,5 ≤ Xi < 7,00) Baik/Bagus (menggunakan target tertinggi) dengan capaian kinerja sebesar 101%.

D. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai kinerja didukung oleh faktor-faktor yang memengaruhi dalam meningkatkan ketercapaian indikator Indeks Modal Manusia Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, berikut adalah upaya-upaya yang dilaksanakan, yaitu:

1. Penguatan Sosialisasi Program Pemerintah: Perluasan informasi tentang program ekonomi lokal melalui media digital dan tatap muka agar semua lapisan masyarakat memahami dan terlibat;
2. Pemberdayaan UMKM Berbasis Komunitas: Meningkatkan pelatihan keterampilan kerja dan akses modal bagi pelaku UMKM serta pembinaan koperasi lokal;
3. Pemerataan Peluang Usaha: Memfasilitasi kemitraan antara industri besar dengan warga lokal agar terjadi alih keterampilan dan pembukaan lapangan kerja;
4. Penguatan Nilai Gotong Royong dan Toleransi Sosial: Mengadakan forum rutin antar warga lintas suku dan kelompok sosial untuk membangun rasa saling percaya dan empati;
5. Percepatan Pelayanan Publik yang Inklusif: Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan sosial, khususnya bagi kelompok rentan (difabel, lansia, perempuan kepala keluarga);
6. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB): Memperkuat peran FKUB dalam menjembatani komunikasi antar umat beragama;
7. Program Dialog Lintas Iman: Rutin mengadakan diskusi publik dan kerja sosial lintas agama untuk mempererat hubungan antar komunitas keagamaan;
8. Perbaikan Sarana Ibadah Secara Merata: Pemerataan pembangunan fasilitas ibadah yang representatif sesuai dengan kebutuhan umat beragama di tiap wilayah.
9. Edukasi Multikulturalisme: Menyusun kurikulum muatan lokal tentang keberagaman etnik dan budaya di tingkat sekolah dasar dan menengah;
10. Revitalisasi Budaya Lokal Menyelenggarakan event budaya tahunan dan mendukung sanggar seni sebagai pusat pelestarian budaya lokal.

Dalam pelaksanaan terdapat permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Indeks Modal Manusia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu secara aktif mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memenuhi kuota kuesioner dalam penilaian Indeks Harmoni. Pemenuhan kuota kuesioner menjadi faktor krusial karena berpengaruh langsung terhadap validitas, representativitas, dan akurasi hasil pengukuran indeks tersebut. Data yang tidak terpenuhi secara optimal berpotensi menghasilkan gambaran yang kurang komprehensif mengenai kondisi harmoni sosial di masing-masing daerah, sehingga dapat melemahkan kualitas analisis dan rekomendasi kebijakan.

Selain itu, keterlibatan aktif kabupaten/kota dalam pemenuhan kuesioner mencerminkan komitmen bersama dalam membangun dan menjaga harmoni sosial di wilayah Kepulauan Riau. Oleh karena itu, Pemprov Kepri perlu memperkuat koordinasi, pendampingan teknis, serta monitoring dan evaluasi secara berkala agar proses pengisian kuesioner dapat berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan Indeks Harmoni yang lebih akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data.

E. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan Indeks Modal Manusia dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi di tahun-tahun selanjutnya, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepanya dengan cara:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Lapisan Bawah

   Peningkatan partisipasi tetap perlu dilakukan, terutama dalam rangka memperkuat sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait pentingnya keterlibatan mereka dalam penilaian kebijakan publik. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi komunikasi, termasuk pemanfaatan media lokal, forum diskusi, serta pendekatan berbasis komunitas agar masyarakat lebih memahami peran mereka dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

2. Peningkatan Dimensi Ekonomi

   Dimensi ekonomi memerlukan perhatian lebih agar dapat mencapai tingkat yang lebih baik. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses terhadap peluang usaha dan pekerjaan, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi dalam menciptakan inovasi ekonomi berbasis komunitas juga dapat menjadi strategi efektif untuk memperbaiki indikator ekonomi dalam Indeks Harmoni.

3. Menjaga Isu Sensitif

   Menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama tetap menjadi prioritas utama, Provinsi Kepulauan Riau harus terus dijaga melalui dialog lintas agama, penguatan nilai-nilai kebersamaan, serta kebijakan inklusif yang memastikan semua kelompok masyarakat merasa dihormati dan dilibatkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu mendorong pendidikan multikultural, meningkatkan peran tokoh agama dalam membangun solidaritas sosial, serta mengantisipasi potensi konflik dengan mekanisme deteksi dini. Dengan demikian, stabilitas sosial dapat tetap terjaga, dan nilai toleransi yang sudah baik dapat terus diperkuat.

4. Eskplorasi Literasi Budaya Generasi Muda

   Eksplorasi Literasi Budaya Generasi Muda perlu diperkuat dengan memberikan ruang bagi dinamika dan kreativitas mereka dalam memahami, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya lokal. Pemerintah Daerah dapat mendorong program edukasi budaya di sekolah, festival seni dan budaya, serta pelibatan komunitas kreatif dalam berbagai kegiatan budaya. Selain itu, pemanfaatan media digital dan teknologi dapat menjadi strategi efektif untuk menarik minat generasi muda dalam mengeksplorasi identitas budaya mereka secara lebih interaktif dan relevan dengan perkembangan zaman.

F. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Tabel 7.3.95 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Indeks Harmoni Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.959.964.051,00	1.959.964.051,00	94,4
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	5.273.723.200,00	5.270.644.854,00	99,94
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.079.165.000,00	1.825.239.562,00	87,79
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.120.329.600,00	1.112.879.482,00	99,34
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	11.990.533.160,00	11.954.366.758,00	99,70
Program Pengembangan Kebudayaan	1.948.428.405,00	1.932.034.295,00	99,16
Total	**24.372.143.416,00**	**24.055.129.002,00**	**98.69**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp24.372.143.416,00 terealisasi sebesar Rp24.055.129.002,00 atau 98,69%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp317.014.414,00 (1,3%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Indeks Harmoni (101%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (98,69%) dengan efesiensi 2,3%.

7.3.5.17. Sasaran Mewujudkan Lingkungan Hidup yang estari dan Memberikan Nilai Tambah Sosial Ekonomi Masyarakat serta Ketahanan Daerah

7.3.5.17.1. Indeks Ekonomi Hijau



Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau Daerah pada Tahun 2025 menggunakan Data Tahun 2024 dengan capaian kinerja sebesar 64,47 Indeks dari target sebesar 49,18 Indeks dan terealisasi sebesar 131,09%.

Indeks Ekonomi Hijau Daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu wilayah menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Indeks ini menilai berbagai aspek seperti penggunaan energi terbarukan, efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah, kualitas udara dan air, serta kontribusi sektor-sektor ramah lingkungan terhadap perekonomian daerah. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kemampuan daerah dalam mengarahkan pembangunan menuju ekonomi hijau yang rendah emisi, efisien, dan berdaya saing.

Melalui Indeks Ekonomi Hijau Daerah, pemerintah dapat memantau kinerja pembangunan hijau secara lebih terukur dan memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Indeks ini juga menjadi acuan dalam menyusun strategi peningkatan kualitas lingkungan, mendorong investasi hijau, serta memperkuat inovasi teknologi ramah lingkungan. Dengan demikian, indeks ini berperan penting dalam

membantu daerah bertransisi menuju ekonomi yang lebih inklusif, adaptif terhadap perubahan iklim, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

Indeks Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara tangible, representatif, dan akurat. Indeks Ekonomi Hijau Daerah terdiri dari 16 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar *Sustainable Development*: ekonomi (6 indikator), sosial (4 indikator), dan lingkungan (6 indikator). Indikator ekonomi terdiri dari 6 (enam) indikator: intensitas emisi, intensitas energi, GNI per kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja industri dan jasa. Indikator sosial terdiri dari 4 (empat) indikator: rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Indikator lingkungan terdiri dari 6 (enam) indikator: tutupan hutan, energi baru terbarukan, kualitas air permukaan, kualitas udara, penurunan emisi, dan lahan gambut terdegradasi.

A. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan memberikan nilai tambah sosial ekonomi masyarakat serta ketahanan daerah dapat dilihat dari indikator Indeks Ekonomi Hijau Daerah di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kenaikan yang cukup menggembirakan. Realisasi Indeks Ekonomi Hijau Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 64,47 indeks dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 49,18 Indeks sehingga capaian kinerja sebesar 131,09% atau dalam kategori “Sangat Baik.”

Tabel 7.3.96 Capaian Indeks Ekonomi Hijau Daerah

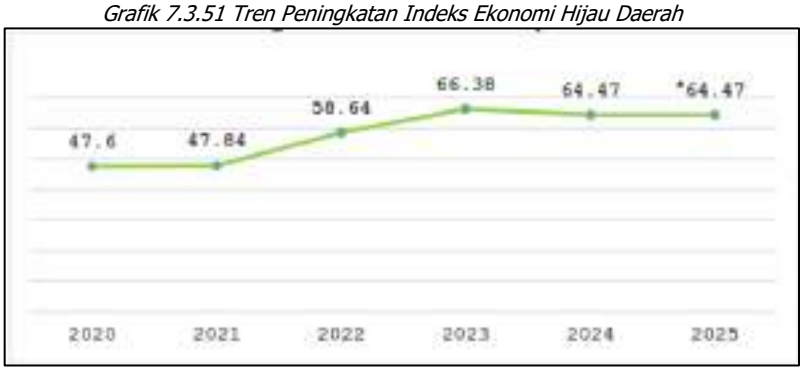
Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Ekonomi Hijau Daerah	49,18 Indeks	64,47 Indeks	131,09 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

B. Perbandingan antara Realisasi dengan Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Indeks Ekonomi Hijau Daerah Provinsi Kepulauan Riau meningkat setiap tahunnya, dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 7.3.51 Tren Peningkatan Indeks Ekonomi Hijau Daerah



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Indeks Ekonomi Hijau Daerah menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2020–2025, meskipun terjadi fluktuasi pada tahun-tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai indeks tercatat sebesar 47,60, kemudian mengalami

kenaikan tipis pada tahun 2021 menjadi 47,84. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada awal periode, penerapan prinsip ekonomi hijau masih berada pada tahap awal dan peningkatannya belum terlalu progresif. Memasuki tahun 2022, Indeks Ekonomi Hijau meningkat cukup tajam menjadi 58,64, yang mengindikasikan mulai menguatnya komitmen dan implementasi kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan. Puncak capaian terjadi pada tahun 2023 dengan nilai indeks sebesar 66,38, mencerminkan keberhasilan daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan, termasuk efisiensi pemanfaatan sumber daya, pengendalian dampak lingkungan, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi berkelanjutan.

Namun demikian, pada tahun 2025, nilai Indeks Ekonomi Hijau menggunakan nilai tahun 2024 dengan angka 64,47 hal ini disebabkan belum selesainya proses penilaian oleh BAPPENAS RI.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun yang Dinilai dengan Target Akhir RPJMD

Grafik 7.3.52 Tren Peningkatan Indeks Ekonomi Hijau Daerah

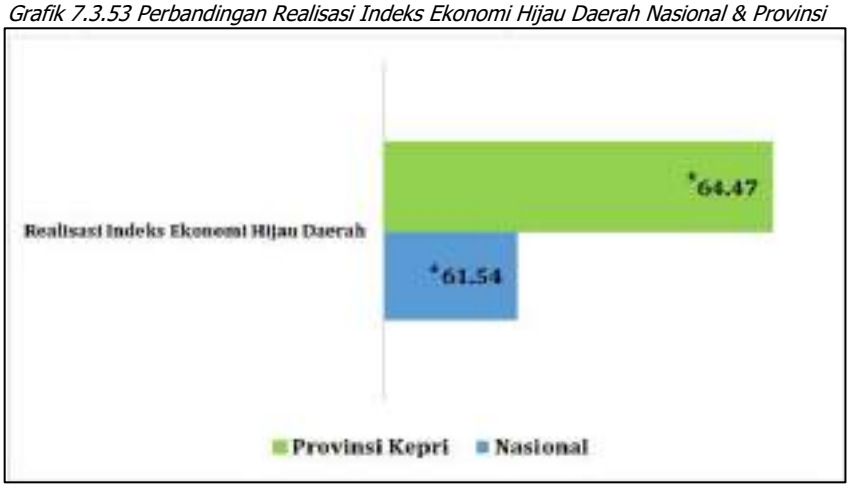


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja Indeks Ekonomi Hijau Daerah di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 64,47 indeks dengan target sebesar 51,34 indeks sehingga capaian kinerja sebesar 124%.

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun yang Dinilai dengan Standar Nasional

Grafik 7.3.53 Perbandingan Realisasi Indeks Ekonomi Hijau Daerah Nasional & Provinsi



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Capaian Indeks Ekonomi Hijau Daerah Provinisi Kepulauan Riau lebih tinggi dari pada capaian rata-rata nasional, hal ini mencerminkan keberhasilan dalam mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial secara seimbang.

E. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai kinerja didukung oleh faktor-faktor yang memengaruhi dalam meningkatkan ketercapaian indikator Indeks Ekonomi Hijau Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, diantaranya adalah penyusunan dokumen rencana tanam tahunan, penghijauan lingkungan, rehabilitasi mangrove, pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan, sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan, pemantauan terhadap air baku, pengendalian dan penanganan pengaduan terhadap kerusakan lingkungan hidup.

Selain langkah-langkah dasar seperti efisiensi energi, pengelolaan sampah, dan pelestarian lingkungan, peningkatan Indeks Ekonomi Hijau Daerah juga dapat didorong melalui penguatan green investment dan insentif fiskal hijau. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyediakan kemudahan perizinan, pengurangan pajak, atau fasilitas pembiayaan bagi pelaku usaha yang menerapkan teknologi ramah lingkungan atau menjalankan usaha berbasis ekonomi sirkular. Di sisi lain, pengembangan industri hijau perlu didukung dengan riset dan inovasi untuk menghasilkan produk yang rendah emisi serta berdaya saing tinggi. Hal ini dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta.

Melalui program pendidikan yang ramah lingkungan memiliki keterkaitan sangat strategis, pendidikan menjadi fondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Melalui pendidikan, masyarakat dibekali pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang mendukung perilaku ramah lingkungan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kesadaran terhadap dampak aktivitas ekonomi terhadap lingkungan. Tingkat pendidikan yang baik mendorong adopsi teknologi hijau, inovasi berkelanjutan, dan praktik produksi serta konsumsi yang lebih bertanggung jawab, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap peningkatan Indeks Ekonomi Hijau.

Selain itu, pendidikan berperan dalam menciptakan tenaga kerja yang siap mendukung transformasi menuju ekonomi hijau, seperti di sektor energi terbarukan, pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, dan industri rendah emisi. Pendidikan juga memperkuat kapasitas kelembagaan dan partisipasi publik dalam perumusan serta pengawasan kebijakan lingkungan. Dengan demikian, semakin tinggi kualitas dan pemerataan pendidikan, semakin besar pula peluang suatu daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan, yang tercermin dalam nilai Indeks Ekonomi Hijau yang lebih baik.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha melalui edukasi berkelanjutan terkait praktik ramah lingkungan, seperti penggunaan energi bersih, pertanian organik, dan efisiensi sumber daya. Pemerintah daerah juga dapat memperluas program penghijauan kota dan perlindungan ekosistem penting, seperti mangrove dan hutan lindung, untuk memperkuat layanan ekosistem yang menjadi dasar ekonomi hijau. Selain itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data lingkungan sangat penting untuk memastikan kebijakan tetap tepat sasaran dan dampaknya dapat diukur secara berkala, sehingga efisiensi dan keberlanjutan pembangunan hijau dapat terus ditingkatkan.

Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun pelaku usaha tentang pentingnya praktik ekonomi hijau. Banyak kegiatan ekonomi masih bergantung pada pola produksi konvensional yang boros energi, menghasilkan limbah tinggi, dan tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Keterbatasan data lingkungan yang akurat dan terbarui juga menjadi hambatan, sehingga pemerintah daerah kesulitan memantau capaian indikator- indikator hijau secara konsisten. Selain itu, keterbatasan anggaran dan investasi hijau menyebabkan adopsi teknologi ramah lingkungan berjalan lambat dan hanya dilakukan oleh sektor-sektor tertentu.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya koordinasi lintas sektor, baik antarorganisasi pemerintah daerah maupun antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat. Banyak regulasi yang belum terintegrasi, sehingga kebijakan lingkungan sering tumpang tindih atau kurang memberikan insentif nyata bagi pelaku usaha untuk beralih ke praktik hijau. Infrastruktur pendukung seperti pengelolaan sampah modern, transportasi rendah emisi, serta jaringan energi terbarukan juga belum merata. Di sisi lain, adanya tekanan pembangunan ekonomi jangka pendek membuat sebagian pihak menganggap ekonomi hijau sebagai tambahan biaya, bukan investasi jangka panjang, sehingga komitmen untuk beralih ke arah yang lebih berkelanjutan belum sepenuhnya kuat.

F. Upaya-upaya Perbaikan Kinerja Kedepan

Dalam rangka meningkatkan Indeks Ekonomi Hijau Daerah dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi di tahun-tahun selanjutnya, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepanya dengan kedepanya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung praktik ekonomi hijau secara lebih tegas dan terintegrasi, termasuk pemberian insentif fiskal seperti keringanan pajak, subsidi energi terbarukan, maupun dukungan pembiayaan hijau bagi UMKM. Penyusunan peta jalan (roadmap) ekonomi hijau yang jelas

dan berbasis data juga penting agar setiap sektor industri, energi, transportasi, dan pertanian memiliki arah transisi yang terukur. Selain itu, memperbaiki kualitas data lingkungan melalui sistem monitoring berbasis teknologi dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat serta memudahkan evaluasi capaian indeks secara berkala.

Mendorong Percepatan Transisi Energi Bersih (EBT) berupa Perluasan PLTS atap untuk gedung pemerintah, sekolah, puskesmas, dan kawasan industri, Pengembangan PLTS komunal/hybrid untuk pulau kecil yang bertujuan menurunkan emisi, menekan biaya energi, memperkuat ketahanan energi pulau. Dan Implementasi Efisiensi Energi di Industri dan Bangunan melalui kegiatan sosialisasi penerapan manajemen energi di kawasan industri. Konversi lampu jalan dan fasilitas publik ke LED hemat energi. Yang bertujuan pada konsumsi energi lebih efisien, biaya operasional turun, emisi menurun.

Dalam jangka panjang, penguatan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha menjadi kunci. Program pendidikan, kampanye sadar lingkungan, serta pelatihan teknologi hijau dapat memperluas adopsi praktik berkelanjutan. Pemerintah daerah juga perlu mempercepat pembangunan infrastruktur hijau seperti transportasi rendah emisi, fasilitas pengolahan sampah modern, dan jaringan energi terbarukan yang terjangkau. Kolaborasi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, dan komunitas lingkungan harus diperluas agar inovasi dan investasi hijau dapat tumbuh lebih cepat. Dengan langkah-langkah tersebut, daerah dapat menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan nilai indeks ekonomi hijau secara signifikan.

G. Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Tabel 7.3.97 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Indeks Harmoni Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	376.608.737,00	148.907.020,00	39,54
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	72.117.000,00	71.758.000,00	99,5
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	10.428.400,00	9.568.650,00	91,76
Program Pengelolaan Persampahan	1.197.821.048,00	1.187.931.990,00	99,17
Program Pengelolaan Hutan	2.288.386.160,00	1.966.812.325,00	85,95
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	303.755.350,00	292.625.500,00	96,34
Program Pengelolaan Pendidikan	365.322.687.667,00	302.664.866.697,00	82,85
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	187.656.000,00	153.676.514,00	81,89
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	42.439.000,00	26.028.317,00	61,33
Progran Pengembagan Kurikulum	114.475.500,00	70.519.443,00	61,60
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.679.375.457,00	3.446.904.943,00	51,61
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	240.000.000,00	238.000.000,00	99,17
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	25.589.819.624,00	18.123.254.494,00	70,82
Total	**402.425.569.943,00**	**328.400.853.893,00**	**81.61**

Dari jumlah anggaran sebesar Rp402.425.569.943,00 terealisasi sebesar Rp328.400.853.893,00 atau 81,61%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp74.024.716.050,00 (18,39%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Indeks Ekonomi Hijau Daerah (131,09%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (81,61%) dengan efesiensi 49,48%.

7.3.6. Pencapaian Pemenuhan *Mandatory Spending* dalam APBD

Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah mengamanatkan Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Mandatory Spending* adalah salah satu belanja atau pengeluaran yang sudah diatur oleh undang-undang dengan tujuan utama untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Aturan ini juga mengakomodasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). *Mandatory Spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran Fungsi Pendidikan paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa.

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025, Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka memenuhi *Mandatory Spending* memperhatikan beberapa hal khusus yang antara lain:

1. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

Peningkatan pelayanan bidang pendidikan dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 31 ayat 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenihi kebutuhan penyelengaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya. Untuk itu dalam

rangka pemenuhan Anggaran Fungsi Pendidikan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan Anggaran Fungsi Pendidikan sebesar Rp1.110.730.832.324,21 dari total Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp3.932.501.110.900,44 atau dengan rasio sebesar 28,24%. Jika dilihat dari anggaran yang dialokasikan untuk Fungsi Pendidikan artinya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memenuhi ketentuan amanat ketentuan perundang-undangan. Pada periode 31 Desember 2025 Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan terealisasi sebesar Rp1.076.432.770.591,20 atau sebesar 96,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.110.730.832.324,21. Berikut Uraian Alokasi dan realisasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan:

Tabel 7.3.98 Alokasi dan realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
1	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**1.580.950.687,00**	**1.531.364.444,00**	**96,86**
	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	169.836.439,00	154.090.034,00	90,73
	Pembentukan Paskibraka	1.411.114.248,00	1.377.274.410,00	97,60
2	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**71.593.402,00**	**25.427.400,00**	**35,52**
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	71.593.402,00	25.427.400,00	35,52
3	**Badan Pendapatan Daerah**	**1.778.926.000,00**	**1.544.512.500,00**	**86,82**
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.725.768.600,00	1.529.329.500,00	88,62
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	53.157.400,00	15.183.000,00	28,56
4	**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**106.383.412,07**	**96.672.723,00**	**90,87**
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	32.515.230,00	31.433.500,00	96,67
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	46.672.452,07	44.974.498,00	96,36
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	27.195.730,00	20.264.725,00	74,51
5	**Dinas Kebudayaan**	**3.055.870.791,49**	**2.900.007.726,31**	**94,90**
	Pelindungan Cagar Budaya	137.801.567,00	136.367.760,31	98,96
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	213.890.000,00	213.750.000,00	99,93
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	298.607.520,00	297.273.686,00	99,55
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	56.581.688,66	56.475.046,00	99,81
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	244.913.500,00	243.064.333,00	99,24
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	91.017.385,00	77.946.276,00	85,64
	Penetapan Cagar Budaya	4.588.910,00	3.600.000,00	78,45
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	697.191.178,00	568.079.841,00	81,48
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	190.579.784,00	184.050.784,00	96,57
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	20.699.258,83	19.400.000,00	93,72
6	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**205.209.900,00**	**203.709.900,00**	**99,27**
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	205.209.900,00	203.709.900,00	99,27
7	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	**20.303.136.099,50**	**18.476.960.125,00**	**91,01**

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	953.441.000,00	895.001.490,00	93,87
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	2.249.250.000,00	2.134.077.567,00	94,88
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	2.210.656.000,00	2.037.089.600,00	92,15
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	70.000.000,00	67.933.000,00	97,05
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	638.857.400,00	370.499.289,00	57,99
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	100.000.000,00	94.360.333,00	94,36
	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	400.000.000,00	170.276.842,00	42,57
	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	100.000.000,00	89.406.300,00	89,41
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	900.000.000,00	823.128.490,00	91,46
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	8.310.000.000,00	8.223.614.975,00	98,96
	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	4.270.931.699,50	3.471.572.239,00	81,28
8	**Dinas Kesehatan**	**730.157.200,00**	**711.016.308,00**	**97,38**
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	730.157.200,00	711.016.308,00	97,38
9	**Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan**	**2.267.258.227,00**	**2.182.845.948,00**	**96,28**
	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	2.267.258.227,00	2.182.845.948,00	96,28
10	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**2.990.000,00**	**2.980.000,00**	**99,67**
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2.990.000,00	2.980.000,00	99,67
11	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**303.755.350,00**	**292.625.500,00**	**96,34**
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	303.755.350,00	292.625.500,00	96,34
12	**Dinas Pariwisata**	**287.493.300,00**	**264.492.933,00**	**92,00**
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	91.362.000,00	83.676.963,00	91,59
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	23.513.300,00	21.495.000,00	91,42
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	82.674.000,00	76.251.770,00	92,23
	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	89.944.000,00	83.069.200,00	92,36
13	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**362.254.600,00**	**249.151.301,00**	**68,78**
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	336.494.600,00	223.391.301,00	66,39
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	25.760.000,00	25.760.000,00	100,00
14	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**	**1.572.515.045,00**	**1.226.343.382,00**	**77,99**

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	786.089.915,00	691.593.745,00	87,98
	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	81.756.330,00	75.341.590,00	92,15
	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	200.000.000,00	182.382.860,00	91,19
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	275.032.600,00	86.489.578,00	31,45
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	200.000.000,00	179.656.109,00	89,83
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	29.636.200,00	10.879.500,00	36,71
15	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	**21.047.250,00**	**20.895.098,00**	**99,28**
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	21.047.250,00	20.895.098,00	99,28
16	**Dinas Pendidikan**	**1.001.251.763.644,57**	**974.415.970.345,89**	**97,32**
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	154.502.000,00	19.729.000,00	12,77
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	125.432.000,00	109.961.950,00	87,67
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	61.741.000,00	59.269.443,00	96,00
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	52.734.500,00	11.250.000,00	21,33
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	335.585.000,00	116.036.126,60	34,58
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	17.034.763.270,00	11.564.337.108,75	67,89
	Pembangunan Ruang Laboratorium	549.214.106,25	540.493.504,98	98,41
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	751.648.867,00	741.590.869,77	98,66
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	23.163.426,00	22.696.354,54	97,98
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.020.760.729,00	6.556.577.886,21	81,75
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.400.000.000,00	1.193.765.493,00	85,27
	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	3.100.000.000,00	2.662.002.340,00	85,87
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	68.519.000,00	59.811.228,00	87,29
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	199.424.300,00	126.612.400,00	63,49
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	37.740.600,00	36.993.398,00	98,02
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	291.651.750,00	94.581.191,00	32,43
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	818.863.290,01	597.290.853,00	72,94
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	96.438.000,00	64.641.609,00	67,03
	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	12.749.442.000,00	11.219.318.286,00	88,00
	Pengadaan Mebel Sekolah	2.586.633.000,00	1.832.459.980,00	70,84
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	11.894.766.986,20	10.557.653.296,00	88,76
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	156.308.672,00	5.850.000,00	3,74
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	115.202.195.150,00	111.987.569.154,00	97,21
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	80.601.468.910,00	80.091.960.644,84	99,37
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	10.344.744.423,00	10.329.652.162,00	99,85
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	104.704.000,00	99.615.989,00	95,14
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	382.771.000,00	367.602.791,00	96,04
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	401.195.000,00	378.712.028,00	94,40

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	58.608.100,00	44.719.310,00	76,30
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15.384.000,00	11.058.317,00	71,88
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	27.055.000,00	14.970.000,00	55,33
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	7.007.451.100,00	6.812.574.085,00	97,22
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	2.555.015.500,00	2.228.175.500,00	87,21
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	635.400.465.377,78	626.966.334.306,00	98,67
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	4.639.444.223,00	4.513.273.732,00	97,28
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	50.078.859.872,30	49.654.455.200,48	99,15
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	31.764.237.052,03	31.508.094.258,00	99,19
	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	170.632.000,00	158.541.200,00	92,91
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	41.849.540,00	34.818.886,00	83,20
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	285.655.900,00	269.103.940,00	94,21
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	91.218.000,00	89.034.905,00	97,61
	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	195.585.000,00	191.865.417,72	98,10
	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.250.000.000,00	349.869.869,00	27,99
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	123.892.000,00	121.046.333,00	97,70
17	**Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan**	**2.218.392.637,00**	**1.725.090.987,00**	**77,76**
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	49.400.000,00	47377500,00	95,91
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	433.600.000,00	391.317.831,00	90,25
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	20.000.000,00	17.467.908,00	87,34
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	92.776.000,00	90.468.250,00	97,51
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	602.248.000,00	575.630.935,00	95,58
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	702.785.237,00	305.553.235,00	43,48
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	52.657.600,00	50.037.000,00	95,02
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	30.790.000,00	27.123.800,00	88,09
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	165.135.800,00	153.894.100,00	93,19
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	10.000.000,00	9.609.375,00	96,09
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	59.000.000,00	56.611.053,00	95,95
18	**Dinas Sosial**	**878.547.149,00**	**712.986.425,00**	**81,16**
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	288.720.491,00	282.245.811,00	97,76
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	589.826.658,00	430.740.614,00	73,03
19	**Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi**	**7.344.430.453,00**	**6.957.912.197,00**	**94,74**
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	1.320.563.753,00	1.090.463.615,00	82,58
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	6.023.866.700,00	5.867.448.582,00	97,40
20	**Inspektorat**	**91.370.800,00**	**73.801.929,00**	**80,77**
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	91.370.800,00	73.801.929,00	80,77
21	**Sekretariat Daerah**	**66.296.786.376,58**	**62.818.003.419,00**	**94,75**

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	17.309.428.960,58	16.498.529.352,00	95,32
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	40.797.200,00	33.828.800,00	82,92
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	48.946.560.216,00	46.285.645.267,00	94,56
	Grand Total	**1.110.730.832.324,21**	**1.076.432.770.591,20**	**96,91**

2. Alokasi Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik

Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Pemerintah Daerah diminta untuk mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik Pemerintah sebesar Rp1.071.561.157.394,59 atau 33,32% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah sebesar Rp3.215.685.060.367,44. Pada saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum dapat memenuhi alokasi sebesar 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam perubahan APBD TA berkenaan, akan tetapi secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas fiskal daerah pada periode 31 Desember 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merealisasikan Anggaran sebesar Rp946.125.697.988,18 atau sebesar 88,29% dari total belanja infrastruktur pelayanan publik Pemerintah yang di tetapkan dalam APBD. Berikut Uraian alokasi dan realisasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik:

Tabel 7.3.99 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
1	**Badan Kepegawaian dan KORPRI**	**978.719.603,00**	**945.260.639,00**	**96,58**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57.269.252,00	52.908.860,00	92,39
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.671.000,00	13.315.500,00	97,40
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	26.447.000,00	24.791.283,00	93,74
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	43.484.200,00	86,97
	Penyediaan Bahan/Material	34.892.900,00	34.238.900,00	98,13
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.015.600,00	8.627.678,00	86,14
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.565.000,00	22.266.000,00	87,10
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	415.032.768,00	411.908.700,00	99,25
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	110.000.000,00	103.491.640,00	94,08
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.000.000,00	87.880.000,00	99,86
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.694.602,00	96,95
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.522.069,00	48.696.996,00	94,52

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.748.800,00	7.458.771,00	96,26
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.555.214,00	76.497.509,00	97,38
2	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**12.056.779.929,80**	**9.620.543.457,00**	**79,79**
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	116.534.269,00	114.844.995,00	98,55
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.105.711,98	65.305.019,00	97,32
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.169.088,00	22.360.260,00	92,52
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.288.000,00	19.738.200,00	97,29
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.962.668.698,00	6.898.686.175,00	76,97
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.217.452,00	63.629.860,00	99,08
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	87.247.800,00	85.550.986,00	98,06
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.460.956.502,00	1.108.532.739,00	75,88
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	593.161.504,00	593.095.503,00	99,99
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	296.903.395,00	289.482.935,00	97,50
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.002.000,00	94.771.720,00	99,76
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	268.525.509,82	264.545.065,00	98,52
3	**Badan Keuangan dan Aset Daerah**	**8.713.624.286,50**	**8.038.254.318,95**	**92,25**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.928.693,00	49.651.017,00	95,61
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	332.051.925,00	307.564.079,00	92,63
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	241.614.344,00	207.083.410,00	85,71
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	79.454.634,00	72.417.036,00	91,14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70.972.064,00	67.095.923,00	94,54
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	52.855.799,00	44.171.881,00	83,57
	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	156.630.980,00	146.227.398,00	93,36
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	416.148.563,00	304.704.384,00	73,22
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.722.833,00	111.544.975,00	94,75
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	372.594.876,50	356.020.686,95	95,55
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.235.000,00	80.135.000,00	99,88
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	194.994.301,00	190.864.211,00	97,88
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	122.513.722,00	118.612.458,00	96,82
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.434.072,00	96.591.900,00	97,14
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	909.631.059,00	871.662.490,00	95,83
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.625.910,00	16.837.800,00	85,79
	Pengamanan Barang Milik Daerah	847.061.476,00	725.800.237,00	85,68
	Penilaian Barang Milik Daerah	351.649.803,00	344.621.856,00	98,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	92.750.285,00	91.939.474,00	99,13
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	165.363.534,00	152.732.277,00	92,36
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	195.503.800,00	189.176.785,00	96,76
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	597.740.743,00	569.927.906,00	95,35

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.509.952.552,00	1.455.806.163,00	96,41
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.403.378,00	61.666.456,00	74,83
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	608.520.145,00	560.654.976,00	92,13
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.465.145,00	158.171.000,00	99,81
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.152.157,00	59.672.566,00	99,20
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.225.719,00	152.559.434,00	98,28
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	278.489.459,00	269.677.068,00	96,84
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	36.298.458,00	27.860.552,00	76,75
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	90.069.184,00	59.905.332,00	66,51
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	165.569.673,00	116.897.588,00	70,60
4	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**1.786.127.282,00**	**1.637.105.516,00**	**91,66**
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	13.476.100,60	13.399.983,00	99,44
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.278.452,00	18.549.526,00	83,26
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.565.900,00	9.535.900,00	99,69
	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	24.041.044,00	13.815.300,00	57,47
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	71.593.402,00	25.427.400,00	35,52
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.401.800,00	12.834.301,00	95,77
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.905.600,00	35.875.488,00	99,92
	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	211.015.742,00	191.743.298,00	90,87
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.258.400,00	150.000.000,00	99,83
	Pengelolaan Risiko Bencana	79.037.538,00	33.492.267,00	42,38
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	54.726.049,40	54.141.126,00	98,93
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.427.680,00	18.108.542,00	88,65
	Penyediaan Bahan/Material	12.043.800,00	11.945.070,00	99,18
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.366.800,00	8.179.190,00	97,76
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.037.600,00	115.129.796,00	89,92
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	477.294.692,00	476.394.692,00	99,81
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	155.503.619,00	154.439.890,00	99,32
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	20.580.000,00	20.580.000,00	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.735.500,00	5.217.000,00	90,96
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.383.381,00	43.551.045,00	91,91
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	225.454.182,00	224.745.702,00	99,69
5	**Badan Pendapatan Daerah**	**25.663.966.227,20**	**23.615.805.591,75**	**92,02**
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	50.688.800,00	44.903.100,00	88,59
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.822.764,43	67.071.930,00	90,86
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.171.500,00	5.219.000,00	72,77
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.481.600,00	9.638.502,00	83,95
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	481.773.338,00	446.166.768,00	92,61
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.784.449.694,35	4.492.317.524,00	93,89

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.873.030.050,00	1.825.499.916,00	97,46
	Pengadaan Mebel	464.860.000,00	355.969.000,00	76,58
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	64.838.900,00	62.081.760,00	95,75
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.509.249.408,00	1.322.653.889,00	87,64
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.993.262.507,00	4.753.954.687,00	95,21
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.041.746.448,00	2.804.302.540,00	92,19
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.057.814.611,91	2.051.810.443,00	99,71
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.639.751.481,00	2.446.305.080,75	92,67
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	334.607.000,00	330.632.000,00	98,81
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	140.140.343,00	123.239.684,00	87,94
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	757.996.545,00	443.249.699,00	58,48
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	470.718.796,00	462.589.500,00	98,27
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.652.594.608,52	1.330.011.156,00	80,48
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	159.867.266,50	150.462.050,00	94,12
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	94.100.565,49	87.727.363,00	93,23
6	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	**618.231.592,00**	**586.331.124,00**	**94,84**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.073.468,00	48.512.679,00	94,99
	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	21.098.257,00	20.496.166,00	97,15
	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	20.498.752,00	19.477.177,00	95,02
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	16.896.569,00	12.573.350,00	74,41
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.880.000,00	1.234.234,00	42,86
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.221.551,00	0,00	0,00
	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	17.233.465,00	16.299.860,00	94,58
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.000.000,00	16.500.000,00	91,67
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.190.781,00	25.793.736,00	91,50
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.014.052,00	10.244.587,00	85,27
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.487.531,00	180.487.531,00	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.148.654,00	66.794.300,00	99,47
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.788.309,00	13.233.280,00	95,97
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95.977.355,00	94.837.700,00	98,81
	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	25.722.848,00	17.846.524,00	69,38
7	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**	**3.640.077.570,00**	**3.351.657.760,00**	**92,08**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.551.088,00	65.684.972,00	98,70
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.448.884,00	55.597.567,00	91,97
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.488.100,00	20.956.800,00	85,58
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	561.824.045,00	549.906.210,00	97,88
	Pengadaan Mebel	881.087.526,00	852.546.100,00	96,76
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	280.909.268,90	275.831.750,00	98,19

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.727.536,00	96.140.100,00	74,68
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.391.400,00	4.299.200,00	58,16
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.044.000,00	31.907.969,00	30,38
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	543.150.526,00	530.158.698,00	97,61
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	183.248.560,00	164.282.601,00	89,65
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	330.480.000,00	306.000.000,00	92,59
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.736.590,00	4.420.000,00	65,61
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.382.000,00	5.328.000,00	99,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	145.731.344,00	108.688.800,00	74,58
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	308.876.702,10	279.908.993,00	90,62
8	**Badan Penghubung Daerah**	**5.711.602.503,65**	**5.382.194.049,00**	**94,23**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.048.090,00	26.595.690,00	88,51
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	89.938.130,00	83.151.116,00	92,45
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.776.960,00	23.572.323,00	81,91
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.206.320,00	41.422.866,00	98,14
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	315.749.900,00	219.938.728,00	69,66
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	296.623.456,00	262.647.881,00	88,55
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	458.092.900,65	457.000.000,00	99,76
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.744.500,00	54.744.500,00	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	754.324.664,00	689.910.089,00	91,46
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.777.562.009,00	1.768.692.889,00	99,50
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.573.935.649,00	1.491.128.486,00	94,74
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	129.941.090,00	86,63
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.101.400,00	26.144.940,00	96,47
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.616.600,00	31.598.000,00	99,94
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.881.925,00	75.705.451,00	93,60
9	**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**4.858.582.175,93**	**4.769.816.312,00**	**98,17**
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	41.298.600,00	40.593.150,00	98,29
	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	164.329.600,00	162.996.620,00	99,19
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	107.477.300,00	106.637.275,00	99,22
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	286.589.931,00	268.929.277,00	93,84
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	38.280.060,00	37.272.787,00	97,37
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	114.172.500,00	112.650.533,00	98,67
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.151.831.650,00	1.128.191.709,00	97,95
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	80.733.200,00	79.666.550,00	98,68
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	57.727.400,00	56.607.800,00	98,06
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	208.564.030,00	208.370.193,00	99,91

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	51.837.500,00	51.116.250,00	98,61
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	15.279.400,00	14.018.500,00	91,75
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	55.937.100,00	55.314.504,00	98,89
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.550.000,00	31.984.650,00	98,26
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	166.294.000,00	165.846.210,00	99,73
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.582.771,83	63.825.000,00	98,83
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	44.950.000,00	39.980.000,00	88,94
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.171.273,00	122.435.012,00	98,60
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	124.197.502,00	123.952.040,00	99,80
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000,00	64.980.680,00	92,83
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.061.515.029,10	1.053.698.814,00	99,26
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.757.900,00	94.444.866,00	98,63
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	325.975.822,00	317.615.230,00	97,44
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.000.000,00	189.800.000,00	97,84
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.278.711,00	10.036.953,00	97,65
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.499.596,00	15.162.600,00	97,83
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	154.751.300,00	153.689.109,00	99,31
10	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	**9.515.919.588,60**	**9.162.554.238,93**	**96,29**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.962.800,00	49.434.800,00	98,94
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.780.030,00	31.538.200,00	99,24
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	63.617.442,16	63.165.518,00	99,29
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	6.632.649.719,00	6.515.805.416,49	98,24
	Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	1.355.406.574,00	1.263.498.573,44	93,22
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.340.000,00	22.550.000,00	71,95
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.081.600,00	0,00	0,00
	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Batuan	21.309.600,00	19.012.100,00	89,22
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	8.213.000,00	7.474.900,00	91,01
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	12.160.000,00	9.175.300,00	75,45
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	25.521.300,00	25.521.300,00	100,00
	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	34.794.200,00	30.991.400,00	89,07
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	42.880.000,00	41.843.700,00	97,58
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	9.809.000,00	6.708.900,00	68,40
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.344.795,00	31.401.051,00	94,17

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48.975.000,00	48.893.098,00	99,83
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.004.100,00	31.028.765,00	91,25
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	617.884.548,00	610.596.308,00	98,82
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177.162.504,00	165.189.200,00	93,24
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.582.196,00	83.534.300,00	61,16
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.707.800,00	9.525.909,00	98,13
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.751.380,44	61.360.400,00	99,37
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	6.221.000,00	3.889.300,00	62,52
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	7.761.000,00	5.415.800,00	69,78
11	**Dinas Kebudayaan**	**4.498.433.872,53**	**4.327.323.428,31**	**96,20**
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13.000.000,00	12.985.890,00	99,89
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.013.600,00	8.980.760,00	59,82
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	83.862.208,65	72.341.649,00	86,26
	Pelindungan Cagar Budaya	137.801.567,00	136.367.760,31	98,96
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	213.890.000,00	213.750.000,00	99,93
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	298.607.520,00	297.273.686,00	99,55
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	56.581.688,66	56.475.046,00	99,81
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.340.000,00	18.132.583,00	98,87
	Penetapan Cagar Budaya	4.588.910,00	3.600.000,00	78,45
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	280.315.700,00	270.388.395,00	96,46
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	190.579.784,00	184.050.784,00	96,57
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	570.398.240,22	543.327.707,00	95,25
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.335.549.284,00	1.243.252.049,00	93,09
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.833.370,00	58.888.988,00	93,72
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.000.000,00	43.450.000,00	98,75
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.072.000,00	64.058.131,00	87,66
12	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**15.605.075.522,21**	**15.065.599.714,92**	**96,54**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.758.872,70	22.724.700,00	99,85
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.443.974,04	9.146.600,00	79,93
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	101.694.400,00	81.172.000,00	79,82
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.789.850,00	113.160.034,00	93,68
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	37.624.000,00	32.918.800,00	87,49
	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	57.083.886,00	55.092.632,00	96,51

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	33.395.733,00	33.395.733,00	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	147.724.040,00	143.235.480,00	96,96
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	26.722.605,46	21.794.955,00	81,56
	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	626.419.539,00	571.110.486,00	91,17
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.111.987.230,00	1.062.046.100,00	95,51
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	211.950.880,98	202.891.481,00	95,73
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	17.724.500,00	16.480.700,00	92,98
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	909.778.912,00	859.994.942,00	94,53
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.001.095.008,01	2.948.923.719,00	98,26
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	189.797.462,00	179.057.459,00	94,34
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	361.512.500,00	346.722.502,00	95,91
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.205.900,00	27.172.956,00	99,88
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.088.973.034,00	1.055.660.525,80	96,94
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	6.768.192.500,00	6.558.772.384,00	96,91
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	546.524.595,00	541.593.951,12	99,10
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	151.325.300,02	149.821.015,00	99,01
	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	33.350.800,00	32.710.560,00	98,08
13	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	**8.674.856.197,72**	**7.932.895.402,00**	**91,45**
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	52.608.449,19	40.265.400,00	76,54
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	279.728.400,00	254.133.062,00	90,85
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	87.122.000,00	74.370.600,00	85,36
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	54.619.400,00	41.151.100,00	75,34
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	2.249.250.000,00	2.134.077.567,00	94,88
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	2.210.656.000,00	2.037.089.600,00	92,15
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	103.653.600,00	103.640.000,00	99,99
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	148.276.301,10	127.793.076,00	86,19
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	900.000.000,00	823.128.490,00	91,46
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.383.500,00	65.596.965,00	97,35
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.161.800,00	31.421.880,00	89,36
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	249.146.950,00	218.115.491,00	87,54
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.314.403.993,16	1.178.870.468,00	89,69
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	291.830.000,00	288.127.948,00	98,73
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.455.000,00	44.726.000,00	94,25
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.881.300,00	158.920.000,00	72,28

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.000.000,00	43.045.800,00	95,66
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	318.679.504,27	268.421.955,00	84,23
14	**Dinas Kesehatan**	**291.104.224.293,73**	**281.481.022.356,18**	**96,69**
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	707.180.809,00	701.154.338,00	99,15
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.331.815,00	32.031.150,00	99,07
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	80.989.570,00	77.038.085,00	95,12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.824.000,00	22.808.000,00	95,74
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.000.000,00	17.160.000,00	95,33
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	164.361.538.026,00	165.559.880.954,93	100,73
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	19.913.140.414,00	19.434.043.211,00	97,59
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	14.765.550,00	13.960.000,00	94,54
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	3.139.874.851,00	244.758.856,00	7,80
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	48.994.500,00	46.150.000,00	94,19
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	17.380.000,00	34,76
	Pemeliharaan Mebel	100.000.000,00	99.870.000,00	99,87
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.766.200,00	95.295.000,00	94,57
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.014.823.522,82	2.460.790.330,00	81,62
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	28.549.913.905,00	27.843.795.968,00	97,53
	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	206.060.000,00	205.874.800,00	99,91
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	43.020.600,00	42.568.300,00	98,95
	Pengadaan Mebel	201.019.685,00	197.080.500,00	98,04
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	9.504.537.306,92	7.121.290.843,25	74,93
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.189.378.164,00	4.069.298.886,00	97,13
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9.180.075,00	8.672.600,00	94,47
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	772.869.554,00	699.812.942,00	90,55
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	36.146.157.416,00	34.552.905.884,00	95,59
	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	94.921.400,00	78.529.170,00	82,73
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13.910.000,00	12.633.800,00	90,83
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	21.173.250,00	18.098.000,00	85,48
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.619.000,00	11.140.910,00	95,89
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	228.546.120,00	217.308.008,00	95,08
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	209.473.638,00	201.147.199,00	96,03
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.940.198.108,86	7.995.942.810,00	89,44
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.840.557.166,13	5.727.094.871,00	98,06
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	567.517.320,00	549.812.534,00	96,88
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	219.560.000,00	185.172.200,00	84,34
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.350.000,00	65.399.480,00	95,68
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	77.938.001,00	75.351.310,00	96,68

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	342.057.280,00	330.091.466,00	96,50
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.736.500,00	0,00	0,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	156.718.356,00	141.150.768,00	90,07
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	3.080.582.190,00	2.308.529.182,00	74,94
15	**Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan**	**16.271.102.857,55**	**12.090.637.425,50**	**74,31**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.223.298,00	65.889.240,00	73,03
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	411.518.825,00	411.518.824,50	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.533.000,00	91.086.374,00	87,14
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	393.437.368,00	293.311.537,00	74,55
	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	290.178.000,00	290.178.000,00	100,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	511.900.000,00	511.900.000,00	100,00
	Pengadaan Mebel	69.231.270,65	12.167.820,00	17,58
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	164.217.833,00	21.106.761,00	12,85
	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	3.705.218.980,00	3.702.717.280,00	99,93
	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	7.488.837.348,00	3.957.749.328,00	52,85
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	410.000.000,00	352.354.649,00	85,94
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	194.530.150,00	194.153.780,00	99,81
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.960.000,00	1.960.000,00	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.185.890,00	87.329.010,00	87,17
	Penyediaan Bahan/Material	57.398.340,00	57.369.100,00	99,95
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.121.100,00	7.981.150,00	98,28
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	311.257.820,00	289.515.201,00	93,01
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	972.995.108,61	952.477.815,00	97,89
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	561.797.250,00	460.151.429,00	81,91
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.117.400,00	54.390.000,00	82,26
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.829.800,00	8.678.580,00	73,36
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.300.000,00	84.300.000,00	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.335.776,00	5.191.800,00	97,30
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	118.085.400,29	115.668.337,00	97,95
	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	61.312.000,00	0,00	0,00
	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	76.580.900,00	61.491.410,00	80,30
16	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**6.301.443.411,95**	**5.566.305.778,00**	**88,33**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.003.899,97	42.167.258,00	98,05
	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	37.498.603,00	33.134.991,00	88,36
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	850.720.162,00	834.968.386,00	98,15
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.050.000,00	7.832.852,00	97,30
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.600.000,00	121.424.999,00	99,86
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	20.400.751,00	19.911.692,00	97,60

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	3.018.235.220,00	2.527.180.283,00	83,73
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.229.160,00	72.296.666,00	98,73
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.072.900,00	40.748.126,00	92,46
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.730.800,00	36.480.772,00	94,19
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.065.145.065,00	1.050.918.038,00	98,66
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	142.900.000,00	141.250.390,00	98,85
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.707.900,00	52.206.400,00	99,05
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.157.500,00	6.696.520,00	93,56
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.684.000,00	2.294.998,00	85,51
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.053.500,00	13.278.459,00	88,21
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	596.627.588,46	418.419.684,00	70,13
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	48.595.643,00	38.441.840,00	79,11
	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	16.212.320,26	8.062.279,00	49,73
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98.818.399,26	98.591.145,00	99,77
17	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**5.786.448.244,92**	**3.545.552.494,00**	**61,27**
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	893.017.900,00	740.636.300,00	82,94
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.915.900,00	24.768.900,00	99,41
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	122.800.000,00	120.000.000,00	97,72
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.754.600,00	19.071.842,00	96,54
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.074.300,00	1.640.000,00	79,06
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.490.000,00	24.037.238,00	98,15
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	792.931.576,54	773.793.199,00	97,59
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.520.500,00	115.730.818,00	98,48
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.906.600,00	48.854.000,00	99,89
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.250.200,00	3.063.600,00	94,26
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.167.400,00	44.992.001,00	99,61
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.155.800,00	2.724.000,00	86,32
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86.322.207,00	78.979.700,00	91,49
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	3.602.141.261,38	1.547.260.896,00	42,95
18	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**6.572.488.590,00**	**5.372.070.811,00**	**81,74**
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16.000.000,00	15.984.000,00	99,90
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.033.200,00	137.046.456,00	96,49
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	72.117.000,00	71.758.000,00	99,50
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	177.000.000,00	161.984.508,00	91,52
	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	10.121.048,00	231.990,00	2,29
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	640.610.300,00	572.915.752,00	89,43
	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	66.785.700,00	65.274.540,00	97,74

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	79.648.000,00	77.650.002,00	97,49
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	212.761.498,00	202.033.517,00	94,96
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.080.000,00	18.695.000,00	97,98
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	111.814.400,00	100.605.775,00	89,98
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	334.073.000,00	279.378.657,00	83,63
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	621.432.900,00	0,00	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	352.177.080,00	347.595.112,00	98,70
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	376.608.737,00	152.492.320,00	40,49
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	106.573.600,00	106.236.000,00	99,68
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	143.658.600,00	132.232.760,00	92,05
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	61.935.441,00	59.530.169,00	96,12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.156.454,00	126.669.217,00	84,92
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.076.122.578,00	993.085.248,00	92,28
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	278.337.000,00	277.644.418,00	99,75
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.337.200,00	5.583.650,00	88,11
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.924.000,00	1.970.600,00	24,87
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1.187.700.000,00	1.187.700.000,00	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	102.480.854,00	87.679.630,00	85,56
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	118.000.000,00	88.093.490,00	74,66
19	**Dinas Pariwisata**	**1.976.111.743,00**	**1.829.711.916,00**	**92,59**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.448.130,00	11.212.248,00	90,07
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	7.637.038,00	76,37
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	23.513.300,00	21.495.000,00	91,42
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.020.000,00	18.560.002,00	77,27
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	261.667.700,00	215.418.113,00	82,33
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	349.344.332,00	316.345.506,00	90,55
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.440.000,00	22.521.237,00	58,59
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	956.681.409,00	932.241.159,00	97,45
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.400.000,00	50.074.184,00	99,35
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129.780.000,00	121.776.546,00	93,83
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	119.816.872,00	112.430.883,00	93,84
20	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan**	**112.837.977.617,66**	**78.591.613.788,14**	**69,65**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.415.140,00	68.415.140,00	100,00
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	160.800.000,00	160.500.000,00	99,81
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	36.776.000,00	36.671.600,00	99,72
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	227.773.020,77	225.823.867,00	99,14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	66.137.940,00	66.137.940,00	100,00

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	231.550.180,00	192.941.113,00	83,33
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	152.208.000,00	152.045.656,00	99,89
	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1.145.804.044,00	1.112.605.938,00	97,10
	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	203.316.400,00	203.265.364,00	99,97
	Normalisasi/Restorasi Sungai	6.657.490.700,00	4.294.670.940,00	64,51
	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	34.750.000,00	27.532.256,00	79,23
	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	1.673.424.700,00	1.673.424.700,00	100,00
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	372.899.000,00	372.770.138,00	99,97
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	179.439.875,00	177.987.101,00	99,19
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.185.209.900,00	449.234.339,00	37,90
	Pembangunan Jalan	8.069.693.100,00	3.692.251.981,00	45,75
	Pembangunan Jembatan	12.154.000.000,00	8.906.948.443,69	73,28
	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	1.389.340.880,00	891.684.603,00	64,18
	Pembangunan Tanggul Sungai	68.465.900,00	68.465.900,00	100,00
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	13.938.663.235,03	7.709.447.213,67	55,31
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	86.408.400,00	82.733.143,00	95,75
	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	105.381.749,00	62.139.665,00	58,97
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	90.559.500,00	90.555.000,00	100,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan	7.175.434.000,00	6.262.529.638,00	87,28
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	201.901.000,00	169.785.300,00	84,09
	Pemeliharaan Rutin Jalan	10.269.721.360,00	7.648.437.040,00	74,48
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	99.088.800,00	99.088.800,00	100,00
	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	7.672.499.682,50	4.007.101.994,21	52,23
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	726.904.635,00	392.693.285,00	54,02
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	13.709.997.262,00	10.749.462.796,37	78,41
	Penetapan RTRW Provinsi	192.248.703,00	191.762.545,00	99,75
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.000.000,00	54.746.400,00	99,54
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000,00	69.652.500,00	99,50
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	24.427.070,00	23.611.494,00	96,66
	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	1.284.702.180,00	729.708.161,00	56,80
	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	13.925.800,00	13.925.800,00	100,00
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.504.353.910,00	469.566.211,20	31,21
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	153.278.750,00	140.970.000,00	91,97
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	336.560.100,00	316.417.398,00	94,02
	Penyediaan Bahan/Material	59.691.500,00	58.781.715,00	98,48
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	74.362.000,00	40.122.000,00	53,95
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	975.956.971,36	866.647.579,00	88,80
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.381.354.938,00	2.098.114.902,00	88,11

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	432.661.602,00	424.831.958,00	98,19
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.862.700,00	48.722.588,00	88,81
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	54.459.016,00	51.938.729,00	95,37
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	429.244.900,00	331.995.980,00	77,34
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	66.390.600,00	63.254.056,00	95,28
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.695.008,00	138.669.778,00	92,02
	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	10.000.000,00	9.924.521,00	99,25
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	390.070.000,00	297.810.400,00	76,35
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.158.458.934,00	973.510.876,00	45,10
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	977.065.815,00	941.011.363,00	96,31
	Rehabilitasi Jembatan	3.507.879.740,00	3.498.774.800,00	99,74
	Rekonstruksi Jalan	8.128.239.887,00	5.491.858.049,00	67,57
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.198.033.090,00	1.197.933.090,00	99,99
21	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**1.506.649.898,00**	**1.355.548.051,00**	**89,97**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.760.300,00	31.141.300,00	84,71
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	17.882.000,00	13.874.700,00	77,59
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	102.409.350,00	101.522.824,00	99,13
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	305.000.000,00	184.830.710,00	60,60
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.477.400,00	31.523.600,00	94,16
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.585.000,00	4.041.801,00	88,15
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.460.000,00	20.058.200,00	98,04
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.557.400,00	3.438.700,00	96,66
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	182.319.900,00	182.254.621,00	99,96
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.334.800,00	73.773.562,00	99,24
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.217.500,00	15.343.250,00	94,61
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.058.000,00	6.058.000,00	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	559.334.848,00	552.279.648,00	98,74
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112.231.500,00	111.379.735,00	99,24
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.821.900,00	10.827.400,00	57,53
22	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**	**5.247.997.865,00**	**4.886.274.750,00**	**93,11**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	469.694.379,00	452.413.560,00	96,32
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	29.426.100,00	28.865.101,00	98,09
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.267.600,00	19.113.000,00	52,70
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.404.300,00	3.307.000,00	97,14

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.490.599,00	116.723.160,00	92,28
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.010.000,00	59.658.060,00	99,41
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1.614.930.080,00	1.595.086.742,00	98,77
	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	140.220.000,00	138.871.200,00	99,04
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	275.032.600,00	86.489.578,00	31,45
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	200.000.000,00	179.656.109,00	89,83
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.770.000,00	14.664.000,00	99,28
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.924.900,00	39.635.099,00	99,27
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	334.495.600,00	332.798.019,00	99,49
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	207.567.635,00	199.288.483,00	96,01
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.145.958.580,00	1.122.537.080,00	97,96
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209.681.200,00	199.436.372,00	95,11
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.000.000,00	38.479.000,00	91,62
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.766.200,00	10.296.595,00	95,64
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.337.000,00	102.627.600,00	92,18
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.821.892,00	41.908.467,00	97,87
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	133.199.200,00	104.420.525,00	78,39
23	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	**1.620.640.898,00**	**1.584.399.631,00**	**97,76**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.296.645,00	27.631.740,00	97,65
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.315.912,00	6.201.180,00	98,18
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.901.138,00	40.747.241,00	99,62
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.661.800,00	8.650.000,00	99,86
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.278.431,00	42.217.850,00	99,86
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	111.660.000,00	111.648.800,00	99,99
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.283.795,00	29.649.212,00	97,90
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	252.648.353,00	229.579.720,00	90,87
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.857.264,00	174.124.825,00	96,28
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	631.142.105,00	631.055.105,00	99,99
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.110.448,00	80.887.552,00	95,04
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.200.000,00	43.200.000,00	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.294.800,00	5.179.815,00	97,83
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.038.500,00	3.030.300,00	99,73
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.951.707,00	150.596.291,00	99,76
24	**Dinas Pendidikan**	**109.015.653.549,30**	**91.884.116.679,06**	**84,29**
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	27.116.770,00	5.921.245,00	21,84
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	72.915.000,00	53.656.800,00	73,59
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13.500.000,00	0,00	0,00

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	154.502.000,00	19.729.000,00	12,77
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	125.432.000,00	109.961.950,00	87,67
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	7.272.876.106,00	3.810.136.579,63	52,39
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	335.585.000,00	116.036.126,60	34,58
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	17.034.763.270,00	11.564.337.108,75	67,89
	Pembangunan Ruang Laboratorium	549.214.106,25	540.493.504,98	98,41
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	751.648.867,00	741.590.869,77	98,66
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	23.163.426,00	22.696.354,54	97,98
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.020.760.729,00	6.556.577.886,21	81,75
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.400.000.000,00	1.193.765.493,00	85,27
	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	3.100.000.000,00	2.662.002.340,00	85,87
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	199.424.300,00	126.612.400,00	63,49
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	602.269.850,00	599.271.806,86	99,50
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.325.962.870,00	1.082.338.838,00	81,63
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.449.000,00	24.140.278,00	94,86
	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	12.749.442.000,00	11.219.318.286,00	88,00
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	33.000.000,00	0,00	0,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	471.668.250,00	456.881.926,00	96,87
	Pengadaan Mebel	124.887.867,00	85.692.000,00	68,62
	Pengadaan Mebel Sekolah	2.586.633.000,00	1.832.459.980,00	70,84
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.006.821.779,00	597.867.230,00	59,38
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	156.308.672,00	5.850.000,00	3,74
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25.315.000,00	18.277.433,00	72,20
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	58.608.100,00	44.719.310,00	76,30
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60.520.000,00	52.436.000,00	86,64
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	427.758.403,00	373.247.743,00	87,26
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.253.805,00	68.375.505,00	85,20
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.200.142.600,00	1.659.400.812,00	75,42
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.733.696.683,30	7.596.882.838,00	98,23
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	735.910.530,00	598.480.816,00	81,33
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	309.627.000,00	267.553.380,00	86,41
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.233.700,00	56.377.058,00	93,60
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	4.639.444.223,00	4.513.273.732,00	97,28
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	31.764.237.052,03	31.508.094.258,00	99,19
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	421.216.850,72	334.994.133,00	79,53
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	47.938.300,00	38.876.516,00	81,10
	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	170.632.000,00	158.541.200,00	92,91
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	41.849.540,00	34.818.886,00	83,20
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	285.655.900,00	269.103.940,00	94,21
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	338.684.000,00	321.589.829,00	94,95

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	195.585.000,00	191.865.417,72	98,10
	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.250.000.000,00	349.869.869,00	27,99
25	**Dinas Perhubungan**	**14.554.025.107,78**	**9.164.366.589,91**	**62,97**
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	50.589.000,00	48.837.794,00	96,54
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.252.579,00	66.567.764,00	82,95
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	32.291.000,00	31.476.000,00	97,48
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	19.050.343,00	17.743.673,00	93,14
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	18.091.400,00	11.063.900,00	61,16
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	14.101.600,00	8.613.600,00	61,08
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	17.416.000,00	17.297.500,00	99,32
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	18.673.600,00	14.081.000,00	75,41
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	6.795.627.773,00	3.670.810.561,01	54,02
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	21.971.300,00	21.885.900,00	99,61
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.600.000,00	70.395.090,00	86,27
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.803.600,00	31.400.000,00	56,27
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.010.400,00	75.000.000,00	99,99
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	18.146.800,00	14.588.478,00	80,39
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	953.373.676,00	953.373.676,00	100,00
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	1.684.128.618,00	869.644.866,54	51,64
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000,00	189.850.130,00	94,93
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.000.000,00	57.442.500,00	95,74
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	252.000.000,00	170.039.131,00	67,48
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.135.101.831,31	1.808.643.442,00	84,71
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	413.167.000,00	351.162.503,00	84,99
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.000.000,00	95.760.000,00	99,75
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.834.045,00	98,34
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.894.400,00	22.443.645,00	86,67
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.391.308.807,47	504.296.061,36	36,25
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.425.380,00	32.115.330,00	93,29
26	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**8.059.671.352,00**	**7.535.002.780,00**	**93,49**
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	198.430.886,00	5.487.900,00	2,77
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.609.467,00	65.050.200,00	90,84
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	8.312.726,00	8.000.000,00	96,24

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	200.000.000,00	198.728.895,00	99,36
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.093.011,00	10.832.450,00	82,73
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1.200.000.000,00	1.172.862.164,00	97,74
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.098.350.137,00	2.975.918.069,00	96,05
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.000.000.000,00	888.305.467,00	88,83
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.910.000,00	12.765.000,00	75,49
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.212.600,00	112.837.570,00	97,94
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	208.300.000,00	203.946.000,00	97,91
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.240.284.175,00	1.209.764.815,00	97,54
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.695.000,00	151.986.700,00	98,25
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	196.910.000,00	196.910.000,00	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	269.010.400,00	263.464.900,00	97,94
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.552.950,00	58.142.650,00	84,81
27	**Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan**	**5.321.217.951,00**	**4.711.110.823,40**	**88,53**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.346.140,00	65.257.900,00	96,90
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	49.400.000,00	47.377.500,00	95,91
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.155.291,00	43.155.290,40	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.364.100,00	68.365.800,00	93,19
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	20.000.000,00	17.467.908,00	87,34
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	92.776.000,00	90.468.250,00	97,51
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	602.248.000,00	575.630.935,00	95,58
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	702.785.237,00	305.553.235,00	43,48
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.960.000,00	9.930.000,00	99,70
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	111.484.396,00	103.741.161,00	93,05
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.971.600,00	21.800.700,00	94,90
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	960.184.280,00	905.250.737,00	94,28
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.144.059.432,00	2.090.432.575,00	97,50
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	195.610.586,00	194.441.420,00	99,40
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.533.600,00	27.028.500,00	98,17
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.562.100,00	44.222.200,00	47,78
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.777.189,00	100.986.712,00	95,47
28	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**205.411.203.333,70**	**173.830.514.443,82**	**84,63**
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	74.480.653,00	74.480.653,00	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	265.200.000,00	263.384.287,00	99,32
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.939.859,47	14.274.045,00	95,54
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	526.559.000,00	524.062.499,00	99,53

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	13.020.000,00	13.020.000,00	100,00
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	910.000.000,00	864.998.080,00	95,05
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	865.593.600,00	808.757.305,00	93,43
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.700.000,00	46.041.930,00	98,59
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.094.599.260,00	2.028.300.462,00	65,54
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	119.868.000,00	119.643.122,00	99,81
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	382.910.000,00	382.910.000,00	100,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	916.075.900,00	770.006.756,00	84,05
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	980.095.960,00	979.386.456,00	99,93
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	31.591.291,00	31.591.291,00	100,00
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	16.023.000,00	16.023.000,00	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	113.968.000,00	113.480.000,00	99,57
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	332.666.851,18	325.577.825,00	97,87
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.686.400,00	68.633.370,00	94,42
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	315.940.000,00	252.539.637,00	79,93
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	407.247.432,00	407.247.432,00	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.877.800,00	21.430.900,00	97,96
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.175.600,00	70.256.690,00	88,74
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.000.000,00	95.920.000,00	99,92
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,00	11.788.200,00	98,24
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.143.000,00	30.840.400,00	85,33
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	187.105.636.428,00	157.607.968.638,82	84,23
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	248.032.800,00	244.834.531,00	98,71
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	7.417.386.499,05	7.248.330.934,00	97,72
	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	894.786.000,00	394.786.000,00	44,12
29	**Dinas Sosial**	**2.586.183.160,00**	**2.488.246.687,00**	**96,21**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	204.814.213,79	202.049.454,00	98,65
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	42.880.976,00	40.439.276,00	94,31
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	77.793.014,00	75.061.179,00	96,49
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.801.280,00	32.098.980,00	84,92
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	549.382.000,00	537.328.525,00	97,81
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.672.300,00	39.170.235,00	96,31
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	329.112.915,00	316.140.000,00	96,06
	Pengadaan Mebel	8.919.522,21	8.624.370,00	96,69
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.121.170,00	74.725.200,00	94,44
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	33.187.451,00	32.756.607,00	98,70
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	318.912.496,00	306.447.702,00	96,09

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.476.492,00	51.643.547,00	86,83
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.058.098,00	44.959.498,00	95,54
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.588.360,00	79.389.430,00	92,76
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	421.252.239,00	414.661.351,00	98,44
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	188.152.346,00	173.933.454,00	92,44
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.559.226,00	14.800.851,00	95,13
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.939.743,00	34.110.300,00	97,63
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.559.318,00	9.906.728,00	85,70
30	**Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi**	**4.233.376.389,00**	**3.504.666.978,26**	**82,79**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.804.310,00	18.427.041,00	88,57
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.941.200,00	4.156.839,00	29,82
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.160.000,00	16.006.200,00	93,28
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	548.848.000,00	347.079.481,26	63,24
	Pengadaan Mebel	87.635.000,00	87.635.000,00	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	494.094.800,00	375.442.551,00	75,99
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.179.000,00	81.179.000,00	100,00
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	1.320.563.753,00	1.090.463.615,00	82,58
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.120.000,00	5.760.000,00	94,12
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.253.994,00	111.304.521,00	97,42
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.845.600,00	28.808.622,00	96,53
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	428.554.657,00	370.805.271,00	86,52
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	661.824.374,00	628.693.023,00	94,99
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.573.501,00	147.776.094,00	94,38
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.520.000,00	37.335.000,00	94,47
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.431.000,00	9.718.510,00	93,17
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.122.200,00	123.989.000,00	88,49
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	54.743.000,00	17.798.755,00	32,51
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.162.000,00	2.288.455,00	31,95
31	**Inspektorat**	**5.001.695.346,00**	**4.766.235.804,00**	**95,29**
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	74.757.900,00	29.800.000,00	39,86
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.712.700,00	30.375.650,00	95,78
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	122.478.000,00	121.114.200,00	98,89
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.040.000,00	96.975.000,00	98,91
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	442.507.140,00	441.963.137,00	99,88
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	37.577.900,00	36.783.615,00	97,89
	Pengadaan Mebel	101.775.400,00	99.562.502,00	97,83
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	28.975.800,00	26.497.980,00	91,45
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	638.279.300,00	631.648.615,00	98,96
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	360.362.625,00	354.497.565,00	98,37

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.022.000,00	73.075.000,00	66,42
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	753.759.981,00	745.325.097,00	98,88
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	275.175.000,00	274.334.448,00	99,69
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	519.890.000,00	514.343.326,00	98,93
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.977.000,00	99.669.120,00	99,69
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	802.086.600,00	710.650.555,00	88,60
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	46.963.545,00	93,93
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	309.745.000,00	307.347.320,00	99,23
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	53.102.200,00	51.507.200,00	97,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	91.370.800,00	73.801.929,00	80,77
32	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran**	**5.196.625.133,00**	**4.982.271.432,00**	**95,88**
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.884.500,00	12.572.200,00	97,58
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.774.843,00	29.727.428,00	76,67
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.400.500,00	13.226.600,00	98,70
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	99.429.300,00	98.772.470,00	99,34
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.914.395,00	30.136.035,00	94,43
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	676.450.700,00	570.165.290,00	84,29
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.464.000,00	7.864.518,00	83,10
	Pengadaan Mebel	241.025.000,00	241.025.000,00	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	145.200.000,00	145.200.000,00	100,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	158.409.115,00	155.060.784,00	97,89
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.565.935,00	21.524.565,00	91,34
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.056.261,00	21.303.261,00	96,59
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.000.000,00	146.950.000,00	91,84
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.035.651.091,00	2.997.199.842,00	98,73
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.325.000,00	61.918.050,00	97,78
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	302.489.093,00	298.119.767,00	98,56
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.593.000,00	30.140.500,00	92,48
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.962.700,00	8.858.910,00	98,84
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.677.000,00	6.551.000,00	20,05
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.118.100,00	4.118.100,00	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.234.600,00	81.837.112,00	97,15
33	**Sekretariat Daerah**	**134.143.570.377,16**	**127.769.939.412,05**	**95,25**
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	32.341.918,00	28.730.566,00	88,83
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	26.038.600,00	3.666.600,00	14,08
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	595.011.811,00	558.869.537,00	93,93
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	79.633.000,00	79.511.453,00	99,85
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	99.621.833,00	91.644.426,00	91,99
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	44.514.417,00	43.947.185,00	98,73

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	138.344.500,00	137.951.500,00	99,72
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	772.049.030,00	765.777.633,00	99,19
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.247.525.787,00	1.180.994.195,00	94,67
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.899.585.479,82	3.108.605.294,05	79,72
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.593.102.404,00	22.281.815.253,00	98,62
	Pengadaan Mebel	933.564.320,00	926.345.998,00	99,23
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.808.000,00	42.807.594,00	100,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	514.881.730,80	506.676.317,00	98,41
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	48.946.560.216,00	46.285.645.267,00	94,56
	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	3.620.900,00	3.525.000,00	97,35
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	10.570.900,00	10.525.000,00	99,57
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	130.344.432,00	130.344.000,00	100,00
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	34.573.458,00	33.530.952,00	96,98
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	71.925.315,00	69.710.412,00	96,92
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.215.449.063,63	10.158.654.020,00	99,44
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	350.415.605,00	332.464.531,00	94,88
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.286.289.896,00	6.612.352.850,00	90,75
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.413.142.919,61	19.309.059.950,00	94,59
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.644.446.262,00	1.598.957.882,00	97,23
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.203.315.111,00	4.101.038.407,00	97,57
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.423.847.537,30	7.363.011.884,00	99,18
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.072.600,00	5.024.970,00	99,06
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.025.627.081,00	1.809.451.084,00	89,33
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	263.501.100,00	96.614.473,00	36,67
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95.845.150,00	92.685.179,00	96,70
34	**Sekretariat DPRD**	**26.490.853.924,70**	**24.750.747.806,00**	**93,43**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	207.424.940,00	88.348.275,00	42,59
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	93.519.900,00	81.185.000,00	86,81
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	97.528.404,00	96.928.627,00	99,39
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	92.742.834,00	91.865.641,00	99,05
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	19.609.620,00	98,05
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	292.280.000,00	283.026.890,00	96,83
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249.445.000,00	247.270.200,00	99,13
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	437.440.000,00	91.193.160,00	20,85
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	167.226.888,00	167.226.888,00	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.386.110.156,00	1.829.149.992,00	76,66
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	2.305.650.000,00	2.303.704.675,00	99,92
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	360.250.000,00	60.210.000,00	16,71
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.766.168.578,89	11.684.853.139,00	99,31

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.024.333.165,00	1.747.095.491,00	86,30
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.133.972.440,00	2.117.770.862,00	99,24
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.023.064.460,00	3.016.536.222,00	99,78
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	622.350.000,00	620.997.670,00	99,78
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	165.442.058,81	162.799.254,00	98,40
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	45.905.100,00	40.976.200,00	89,26
	Grand Total	**1.071.561.157.394,59**	**946.125.697.988,18**	**88,29**

3. Alokasi Anggaran Pengendalian Inflasi

Belanja daerah untuk penanganan inflasi adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang secara khusus dikerahkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengendalikan dampak kenaikan harga barang dan jasa, menjaga tingkat daya beli masyarakat, serta memastikan stabilitas kelancaran rantai pasokan kebutuhan pokok, serta melindungi daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan di wilayahnya. Secara teknis, penganggaran Belanja Inflasi merujuk kepada pedoman dari Kementerian Dalam Negeri yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan juga Kementerian Keuangan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026 Dan Tahun 2027, di mana pemerintah daerah diinstruksikan untuk melakukan optimalisasi APBD guna merespons gejolak Inflasi. Pada periode 31 Desember 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merealisasikan Anggaran Pengendalian Inflasi sebesar Rp17.524.038.410,43 atau sebesar 81,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.532.840.044,00. Berikut uraian Alokasi dan Realisasi Anggaran Pengendalian Inflasi:

Tabel 7.3.100 Alokasi dan Realisasi Anggaran Pengendalian Inflasi

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
1	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**3.391.628.898,00**	**3.246.891.762,92**	**95,73**
	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	626.419.539,00	571.110.486,00	91,17
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.111.987.230,00	1.062.046.100,00	95,51
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	17.724.500,00	16.480.700,00	92,98
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.088.973.034,00	1.055.660.525,80	96,94
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	546.524.595,00	541.593.951,12	99,10
2	**Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan**	**7.735.140.503,00**	**7.129.609.396,50**	**92,17**
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	411.518.825,00	411.518.824,50	100,00
	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	2.267.258.227,00	2.182.845.948,00	96,28
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	26.124.000,00	26.124.000,00	100,00
	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	290.178.000,00	290.178.000,00	100,00
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	408.171.039,00	16.935.580,00	4,15
	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	3.705.218.980,00	3.702.717.280,00	99,93

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	194.530.150,00	194.153.780,00	99,81
	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	61.312.000,00	0,00	0,00
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	370.829.282,00	305.135.984,00	82,28
3	**Dinas Perhubungan**	**7.784.564.249,00**	**4.656.070.215,01**	**59,81**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	17.416.000,00	17.297.500,00	99,32
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	6.795.627.773,00	3.670.810.561,01	54,02
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	18.146.800,00	14.588.478,00	80,39
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	953.373.676,00	953.373.676,00	100,00
4	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**1.770.346.356,00**	**1.658.411.932,00**	**93,68**
	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	621.524.637,00	555.415.764,00	89,36
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	253.672.739,00	250.427.000,00	98,72
	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	895.148.980,00	852.569.168,00	95,24
5	**Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi**	**148.046.000,00**	**140.795.398,00**	**95,10**
	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	148.046.000,00	140.795.398,00	95,10
6	**Sekretariat Daerah**	**703.114.038,00**	**692.259.706,00**	**98,46**
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	703.114.038,00	692.259.706,00	98,46
	Grand Total	**21.532.840.044,00**	**17.524.038.410,43**	**81,38**

4. Alokasi Anggaran Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Belanja daerah Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2025 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah daerah diminta untuk menerapkan strategi dan program penghapusan kemiskinan ekstrem diantaranya sebagai berikut :

a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat.

b. Peningkatan pendapatan Masyarakat.

c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Selain itu Pemerintah Provinsi diminta agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi melalui kegiatan/subkegiatan.

b. Mengkoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh bupati/wali kota melalui kegiatan/subkegiatan

c. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*) melalui kegiatan/subkegiatan

d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan/subkegiatan

e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri.

Pada periode 31 Desember 2025, Anggaran Bidang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem terealisasi sebesar Rp322.080.852.567,04 atau sebesar 92,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp348.866.607.163,31. Berikut uraian Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:

Tabel 7.3.101 Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
1	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**321.222.786,00**	**309.665.374,00**	**96,40**
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	321.222.786,00	309.665.374,00	96,40
2	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	**6.946.594.119,00**	**6.743.232.616,49**	**97,07**
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	6.632.649.719,00	6.515.805.416,49	98,24
	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	313.944.400,00	227.427.200,00	72,44
3	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**8.085.389.630,00**	**7.824.528.384,00**	**96,77**
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	205.209.900,00	203.709.900,00	99,27
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.111.987.230,00	1.062.046.100,00	95,51
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	6.768.192.500,00	6.558.772.384,00	96,91
4	**Dinas Kesehatan**	**27.933.201.238,00**	**26.392.540.626,00**	**94,48**
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	878.896.230,00	868.221.897,00	98,79
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26.251.486.888,00	24.771.833.525,00	94,36
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	39.664.720,00	31.668.630,00	79,84
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	33.773.000,00	11.768.694,00	34,85
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	557.722.000,00	555.250.170,00	99,56
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	76.737.000,00	75.268.540,00	98,09
	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	94.921.400,00	78.529.170,00	82,73
5	**Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan**	**594.159.925,73**	**471.771.517,00**	**79,40**
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	26.124.000,00	26.124.000,00	100,00
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	10.000.000,00	8.505.000,00	85,05
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	479.411.260,73	429.088.592,00	89,50
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	17.312.665,00	8.053.925,00	46,52
	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	61.312.000,00	0,00	0,00
6	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**19.304.268.233,38**	**15.651.494.774,00**	**81,08**
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja,	5.092.891.972,00	4.918.454.819,00	96,57

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	10.606.245.000,00	9.182.799.059,00	86,58
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2.990.000,00	2.980.000,00	99,67
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	3.602.141.261,38	1.547.260.896,00	42,95
7	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan**	**1.572.819.810,00**	**538.032.111,20**	**34,21**
	Pembangunan Tanggul Sungai	68.465.900,00	68.465.900,00	100,00
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.504.353.910,00	469.566.211,20	31,21
8	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**2.266.172.586,00**	**2.056.407.570,00**	**90,74**
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	336.494.600,00	223.391.301,00	66,39
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	108.979.800,00	104.658.962,00	96,04
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	98.543.940,00	60.537.250,00	61,43
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.682.758.846,00	1.630.949.557,00	96,92
	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	39.395.400,00	36.870.500,00	93,59
9	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**	**4.193.686.403,00**	**3.501.433.246,00**	**83,49**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	191.520.850,00	73.090.700,00	38,16
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	786.089.915,00	691.593.745,00	87,98
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	2.798.959.438,00	2.415.752.661,00	86,31
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	140.361.200,00	138.776.600,00	98,87
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	247.118.800,00	171.340.040,00	69,34
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	29.636.200,00	10.879.500,00	36,71
10	**Dinas Pendidikan**	**254.196.821.968,20**	**240.747.473.645,80**	**94,71**
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	17.034.763.270,00	11.564.337.108,75	67,89
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.020.760.729,00	6.556.577.886,21	81,75
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	11.894.766.986,20	10.557.653.296,00	88,76
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	115.202.195.150,00	111.987.569.154,00	97,21
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	80.601.468.910,00	80.091.960.644,84	99,37
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	10.344.744.423,00	10.329.652.162,00	99,85
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	7.007.451.100,00	6.812.574.085,00	97,22
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	2.555.015.500,00	2.228.175.500,00	87,21
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	285.655.900,00	269.103.940,00	94,21
	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.250.000.000,00	349.869.869,00	27,99
11	**Dinas Perhubungan**	**8.530.345.391,00**	**4.589.293.221,55**	**53,80**
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	50.589.000,00	48.837.794,00	96,54
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	6.795.627.773,00	3.670.810.561,01	54,02

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	1.684.128.618,00	869.644.866,54	51,64
12	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**29.043.000,00**	**29.043.000,00**	**100,00**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	13.020.000,00	13.020.000,00	100,00
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	16.023.000,00	16.023.000,00	100,00
13	**Dinas Sosial**	**8.869.015.373,00**	**7.358.487.899,00**	**82,97**
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.234.708.305,00	1.217.064.454,00	98,57
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.902.342.830,00	1.748.337.215,00	91,90
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	12.151.433,00	9.609.100,00	79,08
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	31.642.193,00	29.254.921,00	92,46
	Pelayanan Dukungan Psikososial	112.588.975,00	112.579.700,00	99,99
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	288.720.491,00	282.245.811,00	97,76
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	589.826.658,00	430.740.614,00	73,03
	Pemulasaraan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	24.002.119,00	23.569.168,00	98,20
	Pengasuhan	4.001.645,00	3.672.675,00	91,78
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	620.554.490,00	564.563.126,00	90,98
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	510.637.660,00	509.786.112,00	99,83
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	81.730.881,00	78.926.082,00	96,57
	Penyediaan Alat Bantu	186.366.000,00	170.436.252,00	91,45
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	318.912.496,00	306.447.702,00	96,09
	Penyediaan Makanan	131.210.287,00	124.838.260,00	95,14
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	35.351.595,00	29.460.812,00	83,34
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	26.834.796,00	25.483.412,00	94,96
	Penyediaan Permakanan	2.362.941.300,00	1.310.811.896,00	55,47
	Penyediaan Sandang	384.491.219,00	370.660.587,00	96,40
14	**Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi**	**6.023.866.700,00**	**5.867.448.582,00**	**97,40**
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	6.023.866.700,00	5.867.448.582,00	97,40
	Grand Total	**348.866.607.163,31**	**322.080.852.567,04**	**92,32**

5. Alokasi Anggaran Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarra multisektor di pusat, daerah, dan desa. Alokasi belanja daerah untuk Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting terkait integrasi perencanaan dan penganggaran di daerah serta peningkatan dukungan anggaran percepatan penurunan stunting pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melalui pemetaan dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta pemutakhirannya dengan memperhatikan kebijakan percepatan

penanggulangan stunting berdasarkan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pada periode 31 Desember 2025 Anggaran Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting terealisasi sebesar Rp310.652.701.641,76 atau sebesar 96,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp321.934.434.300,10. Berikut uraian Alokasi dan Realisasi Anggaran Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting:

Tabel 7.3.102 Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
1	**Badan Keuangan dan Aset Daerah**	**165.856.400,00**	**153.086.490,00**	**92,30**
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	165.856.400,00	153.086.490,00	92,30
2	**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**191.525.330,00**	**183.261.345,00**	**95,69**
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	27.195.730,00	20.264.725,00	74,51
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	164.329.600,00	162.996.620,00	99,19
3	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	0,00	0,00	0,00
4	**Dinas Kesehatan**	**178.908.294.566,10**	**179.716.056.829,93**	**100,45**
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	291.901.300,00	283.707.718,00	97,19
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	730.157.200,00	711.016.308,00	97,38
	Peningkatan Pelayanan BLUD	164.361.538.026,00	165.559.880.954,93	100,73
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.630.874.252,00	2.579.678.449,00	98,05
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	10.893.823.788,10	10.581.773.400,00	97,14
5	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**10.530.792.179,00**	**7.500.605.563,00**	**71,23**
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	10.530.792.179,00	7.500.605.563,00	71,23
6	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan**	**2.586.801.474,00**	**1.472.717.239,20**	**56,93**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	105.381.749,00	62.139.665,00	58,97
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.481.419.725,00	1.410.577.574,20	56,85
7	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**1.913.919.346,00**	**1.824.035.644,00**	**95,30**
	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.791.738.646,00	1.735.608.519,00	96,87
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	122.180.700,00	88.427.125,00	72,37
8	**Dinas Pendidikan**	**122.697.175.256,00**	**115.929.216.066,63**	**94,48**
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	16.376.000,00	2.402.000,00	14,67
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	115.407.923.150,00	112.116.677.487,00	97,15
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	0,00	0,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	7.272.876.106,00	3.810.136.579,63	52,39
9	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**1.978.000.000,00**	**1.971.214.000,00**	**99,66**
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1.978.000.000,00	1.971.214.000,00	99,66
10	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**539.579.000,00**	**537.082.499,00**	**99,54**

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	13.020.000,00	13.020.000,00	100,00
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	526.559.000,00	524.062.499,00	99,53
11	**Dinas Sosial**	**2.422.490.749,00**	**1.365.425.965,00**	**56,36**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	2.015.518.059,00	994.184.535,00	49,33
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	15.762.442,00	14.136.884,00	89,69
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	14.436.985,00	13.870.800,00	96,08
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	4.983.768,00	4.014.606,00	80,55
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	65.154.689,00	63.226.400,00	97,04
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	306.634.806,00	275.992.740,00	90,01
	Grand Total	**321.934.434.300,10**	**310.652.701.641,76**	**96,50**

6. Alokasi Anggaran Pengawasan

Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

a. Kegiatan pengawasan, yaitu:

1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemeriksa kinerja.

2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah, meliputi rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), rancangan KUA dan rancangan PPAS, serta RKA-SKPD.

3) Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah.

4) Reviu laporan keuangan.

5) Kegiatan pengawasan lainnya, meliputi *probity audit*, reviu laporan kinerja, reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, serta pemeriksaan pengelolaan keuangan desa.

6) Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas, meliputi:

Pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum), Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK, Operasionalisasi Sapu Bersih

Pungutan Liar (Saber Pungli), Pemeriksaan *investigative*, Tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi serta Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

b. Peningkatan kapabilitas APIP, meliputi: kapabilitas APIP level 3, maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, serta pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.

c. Peningkatan Sarana dan prasarana pengawasan.

d. Pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan publik dan mendukung terwujudnya *Clean Government*, untuk menunjang kinerja Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Provinsi dan UPP Kabupaten/Kota.

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan Anggaran belanja Pengawasan sebesar Rp19.052.380.414,00 atau sebesar 0,48% dari Total APBD Provinsi Kepulauan Riau yang sebesar Rp3.937.501.110.900,44 di luar belanja gaji, tunjangan, dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada SKPD Inspektorat. Hal ini tentunya tidak mengurangi capaian atas kinerja Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepuluan Riau yang pada periode 31 desember 2025 terealisasi sebesar Rp18.375.343.504,00 atau sebesar 96,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.052.380.414,00. Berikut uraian Alokasi dan Realisasi Anggaran bidang pengawasan:

Tabel 7.3.103 Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Pengawasan

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
1	**Inspektorat**	**19.052.380.414,00**	**18.375.343.504,00**	**96,45**
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	74.757.900,00	29.800.000,00	39,86
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.712.700,00	30.375.650,00	95,78
	Kerjasama Pengawasan Internal	1.087.300.000,00	1.084.827.934,00	99,77
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	122.478.000,00	121.114.200,00	98,89
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	785.910.856,00	750.731.230,00	95,52
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	541.320.500,00	534.499.584,00	98,74
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.040.000,00	96.975.000,00	98,91
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	442.507.140,00	441.963.137,00	99,88
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	152.379.900,00	118.406.200,00	77,70
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	39.038.000,00	38.236.680,00	97,95
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	37.577.900,00	36.783.615,00	97,89
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	802.436.880,00	801.906.240,00	99,93
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	350.848.100,00	344.433.220,00	98,17
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	130.794.100,00	124.023.560,00	94,82
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	125.785.300,00	116.177.200,00	92,36
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.072.246.190,00	2.062.423.650,00	99,53

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Pengadaan Mebel	101.775.400,00	99.562.502,00	97,83
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	193.400.500,00	189.457.000,00	97,96
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000,00	0,00	0,00
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.121.359.200,00	1.115.379.060,00	99,47
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.475.689.000,00	1.474.324.774,00	99,91
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	859.689.000,00	791.951.636,00	92,12
	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	603.121.600,00	603.109.402,00	100,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	529.686.000,00	492.560.000,00	92,99
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	28.975.800,00	26.497.980,00	91,45
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	638.279.300,00	631.648.615,00	98,96
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	360.362.625,00	354.497.565,00	98,37
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.022.000,00	73.075.000,00	66,42
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	753.759.981,00	745.325.097,00	98,88
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	275.175.000,00	274.334.448,00	99,69
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	519.890.000,00	514.343.326,00	98,93
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	8.347.300,00	69,56
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.977.000,00	99.669.120,00	99,69
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	802.086.600,00	710.650.555,00	88,60
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	46.963.545,00	93,93
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.359.437.000,00	2.160.323.830,00	91,56
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	309.745.000,00	307.347.320,00	99,23
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	53.102.200,00	51.507.200,00	97,00
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	315.823.362,00	313.862.000,00	99,38
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	332.178.000,00	331.578.000,00	99,82
	Reviu Laporan Keuangan	145.694.000,00	145.349.200,00	99,76
	Reviu Laporan Kinerja	14.547.580,00	7.200.000,00	49,49
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	91.370.800,00	73.801.929,00	80,77
	Grand Total	**19.052.380.414,00**	**18.375.343.504,00**	**96,45**

7. Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan tentang Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM sebagaimana dimaksud diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Penyelarasan program/kegiatan/subkegiatan dengan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial diantaranya terdiri dari beberapa Jenis Pelayanan Dasar untuk daerah provinsi terdiri atas:

a. Pendidikan menengah,

b. Pendidikan khusus,

c. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi,

d. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi,

e. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota,

f. Pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota,

g. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi,

h. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah provinsi,

i. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi,

j. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti,

k. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti,

l. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti,

m. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti dan:

n. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

Pada periode 31 Desember 2025 Anggaran Bidang Standar Pelayanan Minimal terealisasi sebesar Rp108.591.012.079,20 atau sebesar 89,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp121.606.801.365,50. Berikut uraian Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Standar Pelayanan Minimal:

Tabel 7.3.104 Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Standar Pelayanan Minimal

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
A	**Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan**			
1	**Dinas Kesehatan**	**73.437.720,00**	**43.437.324,00**	**59,15**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	39.664.720,00	31.668.630,00	79,84
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	33.773.000,00	11.768.694,00	34,85
B	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan**	**2.586.801.474,00**	**1.472.717.239,20**	**56,93**

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	105.381.749,00	62.139.665,00	58,97
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.504.353.910,00	469.566.211,20	31,21
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	977.065.815,00	941.011.363,00	96,31
C	**Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan**			
1	**Dinas Pendidikan**	**113.706.276.978,50**	**103.058.015.136,00**	**90,64**
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	154.502.000,00	19.729.000,00	12,77
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	125.432.000,00	109.961.950,00	87,67
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	17.034.763.270,00	11.564.337.108,75	67,89
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	751.648.867,00	741.590.869,77	98,66
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.400.000.000,00	1.193.765.493,00	85,27
	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	3.100.000.000,00	2.662.002.340,00	85,87
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	68.519.000,00	59.811.228,00	87,29
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	199.424.300,00	126.612.400,00	63,49
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	37.740.600,00	36.993.398,00	98,02
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	291.651.750,00	94.581.191,00	32,43
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	155.175.970,00	114.930.600,00	74,06
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	96.438.000,00	64.641.609,00	67,03
	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	12.749.442.000,00	11.219.318.286,00	88,00
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	11.894.766.986,20	10.557.653.296,00	88,76
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	104.704.000,00	99.615.989,00	95,14
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	382.771.000,00	367.602.791,00	96,04
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	401.195.000,00	378.712.028,00	94,40
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	58.608.100,00	44.719.310,00	76,30
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	7.007.451.100,00	6.812.574.085,00	97,22
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	2.555.015.500,00	2.228.175.500,00	87,21
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	4.639.444.223,00	4.513.273.732,00	97,28
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	50.078.859.872,30	49.654.455.200,48	99,15
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	41.849.540,00	34.818.886,00	83,20
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	285.655.900,00	269.103.940,00	94,21
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	91.218.000,00	89.034.905,00	97,61
D	**Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman**			
1	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**865.593.600,00**	**808.757.305,00**	**93,43**
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	865.593.600,00	808.757.305,00	93,43
E	**Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial**			
1	**Dinas Sosial**	**4.018.377.774,00**	**2.894.941.116,00**	**72,04**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	12.151.433,00	9.609.100,00	79,08
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	14.436.985,00	13.870.800,00	96,08

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	31.642.193,00	29.254.921,00	92,46
	Pelayanan Dukungan Psikososial	112.588.975,00	112.579.700,00	99,99
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	288.720.491,00	282.245.811,00	97,76
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	58.019.399,00	56.477.814,00	97,34
	Pemulangan ke Daerah Asal	16.706.841,00	15.522.206,00	92,91
	Pemulasaraan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	24.002.119,00	23.569.168,00	98,20
	Pengasuhan	4.001.645,00	3.672.675,00	91,78
	Penyediaan Alat Bantu	186.366.000,00	170.436.252,00	91,45
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	318.912.496,00	306.447.702,00	96,09
	Penyediaan Makanan	131.210.287,00	124.838.260,00	95,14
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	35.351.595,00	29.460.812,00	83,34
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	26.834.796,00	25.483.412,00	94,96
	Penyediaan Permakanan	2.362.941.300,00	1.310.811.896,00	55,47
	Penyediaan Sandang	384.491.219,00	370.660.587,00	96,40
F	**Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum**			
1	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran**	**356.313.819,00**	**313.143.959,00**	**87,88**
	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	54.667.600,00	41.054.995,00	75,10
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	158.409.115,00	155.060.784,00	97,89
	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.500.000,00	0,00	0,00
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	139.737.104,00	117.028.180,00	83,75
	Grand Total	**121.606.801.365,50**	**108.591.012.079,20**	**89,30**

7.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan identitas sebagai berikut:

- Nama Entitas Pelaporan : Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- A l a m a t : Komplek Perkantoran Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Tanjungpinang
- Gubernur : Ansar Ahmad
- Sekretaris Daerah : Misni

Sebagai entitas pelaporan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meliputi seluruh unsur entitas akuntansi yang membentuk dan melaksanakan pemerintahan daerah di Provinsi Kepulauan Riau terdiri:

a. Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur;
b. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah;
c. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
d. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sementara itu, penatausahaan keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

7.4.2. Komponen Utama Kebijakan Akuntansi

Komponen utama kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas:

a. Kerangka Konseptual;
b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
d. Laporan Operasional (LO);
e. Neraca;
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
g. Laporan Arus Kas (LAK);
h. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
i. Laporan Keuangan Konsolidasian;
j. Kas dan Setara Kas;
k. Piutang dan Penyisihan Piutang;
l. Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;

m. Persediaan;
n. Investasi;
o. Aset Tetap;
p. Dana Cadangan;
q. Aset Lainnya;
r. Aset Konsesi Jasa;
s. Properti Investasi;
t. Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan;
u. Kewajiban;
v. Pendapatan-LRA dan Belanja;
w. Pembiayaan;
x. Pendapatan-LO dan Beban;
y. Peristiwa Setelah Pelaporan.

7.4.2.1. Kerangka Konseptual Akuntansi

7.4.2.1.1. Tujuan Kerangka Konseptual

Tujuan Kerangka Konseptual Akuntansi adalah sebagai acuan bagi:

a. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
b. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintahan; dan
c. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintahan.

7.4.2.1.2. Ruang Lingkup

Kerangka konseptual ini membahas:

a. Tujuan kerangka konseptual;
b. Lingkungan akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
c. Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
d. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
e. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen
f. laporan keuangan serta dasar hukum;
g. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi; dan
h. Definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan.

7.4.2.1.3. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

a. Asumsi kemandirian entitas, berari bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dianggap sebagai entitas yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya

kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi kesinambungan entitas adalah Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*) merupakan Laporan keuangan entitas pelaporan menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

7.4.2.1.4. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a. Relevan

   Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

   1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
      Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
   2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).
      Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
   3) Tepat waktu
      Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
   4) Lengkap
      Informasi akuntansi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

   Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1) Penyajian Jujur
   Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
2) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)
   Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
3) Netralitas
   Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan
   Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
d. Dapat dipahami
   Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

7.4.2.1.5. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau:

a. Basis akuntansi
   1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
   2. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau atau oleh entitas pelaporan dan beban

diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

3. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.
4. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Nilai historis (*Historical Cost*)
   1. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
   2. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
c. Realisasi (*Realization*)
   1. Bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.
   2. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.
d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Subtance Over Form*)
   Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
e. Periodisitas (*Periodicity*)
   Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya

yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Konsistensi (*Consistency*)
   Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
g. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)
   Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.
h. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)
   1. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
   2. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

7.4.2.1.6. Kendala Informasi Akuntansi Yang Relevan dan Andal

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

a. Materialitas
   Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.
b. Pertimbangan biaya dan manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif
   Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

7.4.2.2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran diidentifikasikan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut :

a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
b. cakupan entitas pelaporan;
c. periode yang dicakup;
d. mata uang pelaporan; dan
e. satuan angka yang digunakan.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA;
b. Belanja;
c. Transfer;
d. Surplus/defisit-LRA;
e. Penerimaan Pembiayaan;
f. Pengeluaran Pembiayaan;

g. Pembiayaan neto; dan
h. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan-LRA disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.2.3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih awal;
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA);
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
e. Lain-lain; dan
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Selain penyampaian informasi sebagaimana dimaksud diatas, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.2.4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Dalam Laporan Operasional diidentifikasikan secara jelas dan jika dianggap perlu diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
b. cakupan entitas pelaporan;
c. periode yang dicakup;
d. mata uang pelaporan; dan
e. satuan angka yang digunakan.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
a. Pendapatan-LO;
b. Beban;
c. Surplus/Defisit dari operasi;
d. Kegiatan non operasional;
e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;

f. Pos Luar Biasa;
g. Surplus/Defisit-LO

Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

1. Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:
a. Timbulnya hak atas pendapatan;
b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang- undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.

Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

2. Akuntansi Beban

Beban diakui pada saat:

a. timbulnya kewajiban;
b. terjadinya konsumsi aset;
c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum Provinsi Kepulauan Riau. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tidak terduga.

Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.

Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pendapatan-LO dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Termasuk dalam pendapatan-LO/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

5. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
c. kejadian diluar kendali entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

7.4.2.5. Neraca

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset

lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
a. kas dan setara kas;
b. investasi jangka pendek;
c. piutang pajak dan bukan pajak;
d. persediaan;
e. investasi jangka panjang;
f. aset tetap;
g. kewajiban jangka pendek;
h. kewajiban jangka panjang;
i. ekuitas.

Pos-pos selain yang disebutkan diatas, disajikan dalam Neraca jika Kebijakan Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:
a. Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
b. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
c. Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

Aset

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
a. diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
b. berupa kas dan setara kas.

Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai

12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

2. Aset Non Lancar

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi nonpermanen terdiri dari:

a. Pembelian Surat Utang Negara;
b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada fihak ketiga;
c. Dana bergulir; dan
d. Investasi nonpermanen lainnya.

Investasi permanen terdiri dari:

a. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Perusahaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, lembaga keuangan, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
b. Investasi permanen lainnya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari:

a. tanah;
b. peralatan dan mesin;
c. gedung dan bangunan;
d. jalan, irigasi dan jaringan;
e. aset tetap lainnya;dan
f. konstruksi dalam pengerjaan.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaanya.

3. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

4. Pengukuran Aset

Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
d. Persediaan dicatat sebesar:
   1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
   2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
   3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, Lembaga

Keuangan, Entitas Pemerintah Lain, atau Lembaga Internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari fihak ketiga, utang Perhitungan fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*) atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

   Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan poin ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

a. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan
b. tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

4. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

7.4.2.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:

a. Ekuitas awal;
b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
   1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
   2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d. Ekuitas akhir.

Selain penyampaian informasi sebagaimana dimaksud diatas, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur- unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.2.7. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga dikapitalisasikan akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

Dalam hal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih membukukan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran tersebut.

Akun-akun pelaksanaan anggaran adalah akun yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran/transitoris, yang dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan dan nonanggaran/transitoris.

1. Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi diperoleh dari, antara lain:

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
d. Lain-lain PAD yang Sah
e. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer;
f. Penerimaan Hibah; dan
g. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi digunakan untuk pengeluaran, antara lain:

a. Pembayaran Pegawai;
b. Pembayaran Barang/Jasa;
c. Pembayaran Bunga;
d. Pembayaran Subsidi;
e. Pembayaran Hibah;
f. Pembayaran Bantuan Sosial;
g. Pembayaran Tak Terduga.

h. Pembayaran Bagi Hasil;dan
i. Pembayaran Bantuan Keuangan.

Jika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

2. Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain:
a. Pencairan Dana Cadangan;
b. Penjualan atas Tanah;
c. Penjualan atas Peralatan dan Mesin;
d. Penjualan atas Gedung dan Bangunan;
e. Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan;
f. Penjualan Aset Tetap Lainnya;
g. Penjualan Aset Lainnya;
h. Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan;
i. Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain:
a. Pembentukan Dana Cadangan;
b. Perolehan Tanah;
c. Perolehan atas Peralatan dan Mesin;
d. Perolehan atas Gedung dan Bangunan;
e. Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan;
f. Perolehan Aset Tetap Lainnya;
g. Perolehan Aset Lainnya;
h. Penyertaan Modal Daerah;
i. Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen.

3. Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian dan pelunasan pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain:
a. Penerimaan Pinjaman Daerah;
b. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;
c. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
d. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain:
a. Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah;
b. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;

c. Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

4. Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

7.4.2.8. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan pengungkapan hal-hal sebagai berikut:

a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
e. Rincian dan penjelasan pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
f. Informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti kebijakan akuntansi berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang terkait. Misalnya, kebijakan akuntansi pemerintahan tentang persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan dan hasil-hasilnya selama satu periode.

7.4.2.9. Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan atau tidak dilakukan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.2.10. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 7.4.1 Klasifikasi Kas dan Setara Kas

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.1.1	Kas dan Setara Kas			
1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah	-	√
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau	√	-
		Kas di Bank Persepsi	√	-
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU	√	-
1.1.1.04	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD	√	-
		Kas di Bank BLUD	√	-
		Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor	√	-
		Potongan Non Pajak Yang Belum Disetor.	√	-
		Uang Muka Pelayanan BLUD	√	-
1.1.1.05	Kas Dana BOS	Kas Tunai BOS	√	-
		Kas di Bank BOS	√	-
1.1.1.07	Kas Lainnya	Jasa Giro Yang Belum Disetor	√	-
		Potongan PFK yang Belum Disetor	√	-
		Kas di Satuan Pendidikan	√	-
1.1.1.08	Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	-	√
		Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)	-	√

catatan: setara kas pada BLUD mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUD terdiri dari:

a. Saldo rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu saldo rekening pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, yang dikelola oleh BUD.

7.4.2.10.1. Pengakuan

Kas meliputi seluruh uang yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca.

Kas dan setara kas secara umum diakui jika memenuhi kriteria:
a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas telah berpindah ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Saldo kas di kas daerah dan setara kas akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain berasal dari:
a. Penyetoran kas Pendapatan Asli Daerah dari Bendahara Penerimaan;
b. Penyetoran pengembalian sisa pengisian kas dari Bendahara Pengeluaran;
c. Penerimaan pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan Provinsi Kepulauan Riau yang sah;
d. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, hasil penjualan kekayaan Provinsi Kepulauan Riau yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali dana bergulir; dan
e. Penerimaan Provinsi Kepulauan Riau lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Saldo kas di kas daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain:
a. Transfer UP/GU/TU ke rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
b. Belanja, antara lain pembayaran belanja gaji, barang dan jasa, belanja modal, belanja transfer dan belanja tak terduga;
c. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, pemberian dana bergulir; dan
d. Pengeluaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Saldo kas di Bendahara Penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang di transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal

neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu akan bertambah apabila terdapat aliran uang masuk yang antara lain berasal dari:

a. Transfer UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
b. Penerimaan uang pengembalian belanja;
c. Penerimaan jasa giro; dan
d. Penerimaan uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu akan berkurang apabila terdapat aliran uang keluar yang antara lain berasal dari:

a. Belanja yang telah di-SPJ-kan.
b. Penyetoran uang pengembalian belanja/UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, dan
c. Penyetoran uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Uang Panjar yang belum dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dianggap belum sebagai pengurang kas di bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

7.4.2.10.2. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

7.4.2.10.3. Penyajian dan Pengungkapan

Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan Kas dan Setara Kas adalah:

a. Rincian kas dan setara kas;
b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

7.4.2.11. Piutang dan Penyisihan Piutang

7.4.2.11.1. Piutang

Piutang diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 7.4.2 Klasifikasi Piutang

Kode Rekening	Uraian	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	√	√
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	√	-
1.1.05	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	√	-
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	√	-
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	√
1.1.08	Piutang Transfer antar Daerah	-	√
1.1.09	Piutang Lainnya	√	√
1.1.10	Penyisihan Piutang	√	√
1.1.11	Beban Dibayar dimuka	√	√

Piutang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

Pungutan

a. Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:
   1) Piutang Pajak Daerah;
   2) Piutang Retribusi Daerah;
   3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
b. Perikatan

   Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:
   1) Pemberian Pinjaman;
   2) Penjualan;
   3) Kemitraan;
   4) Pemberian fasilitas;
   5) Transaksi Dibayar Dimuka.
c. Transfer antar Pemerintahan

   Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:
   1) Piutang Dana Bagi Hasil;
   2) Piutang Dana Alokasi Umum;
   3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
   4) Piutang Transfer Lainnya;
   5) Piutang Kelebihan Transfer.
d. Tuntutan Ganti Kerugian

   Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian, terdiri atas:
   1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
   2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Bendahara.
e. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat direalisasikannya pengeluaran kas namun unit kerja belum menikmati manfaat atas barang atau jasa yang dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan dilakukan penyesuaian untuk menghitung berapa manfaat barang atau jasa yang telah dikonsumsi dan berapa yang masih menjadi Beban Dibayar Dimuka.

7.4.2.11.1.1 Pengakuan

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Didukung dengan naskah perjanjian/surat ketetapan yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas dan/atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
b. Jumlah piutang dapat diukur;
c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang diakui pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang, yaitu dengan dokumen surat ketetapan tentang piutang atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan tentang piutang dan/atau dokumen surat penagihan yang sudah diterbitkan tetapi belum dilunasi.

Piutang retribusi diakui pada saat dikeluarkannya surat ketetapan retribusi dan jasa layanannya telah digunakan oleh wajib retribusi.

Piutang atas bagian laba BUMD timbul apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Piutang yang timbul atas pemberian fasilitas/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditujukan untuk memanfaatkan barang milik daerah dengan cara berupa sewa/pinjam pakai/kerja sama pemanfaatan/bangun guna serah atau bangun serah guna/kerja sama penyediaan infrastruktur diakui pada saat ditandatangani surat perjanjian kerja sama.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan *intern* manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan sebagai lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, piutang diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

7.4.2.11.1.2 Pengukuran

Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

1. Pengukuran Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam keputusan atas penagihan.

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

2. Pengukuran Piutang Berdasarkan Perikatan

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a. Pemberian pinjamann

   Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas Umum Provinsi Kepulauan Riau dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

   Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
b. Penjualan

Piutang dari penjualan dinilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan
   Piutang yang timbul dinilai berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
d. Pemberian fasilitas/jasa
   Piutang yang timbul dinilai berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3. Pengukuran Piutang Transfer

Pengukuran piutang transfer selaras dengan pengakuan pendapatan transfer, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan yang diatur untuk penyaluran alokasi transfer.

4. Pengukuran Piutang Tuntutan Ganti Rugi

Pengukuran piutang ganti rugi adalah sebagai berikut:

a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

5. Pengukuran Berikutnya (*subsequent measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Tabel 7.4.3 Kualitas / Umur Piutang

<table>
<tr><th rowspan="3">No.</th><th rowspan="3">Jenis Piutang</th><th colspan="4">Kualitas/Umur Piutang</th></tr>
<tr><th>Lancar</th><th>Kurang Lancar</th><th>Diragukan</th><th>Macet</th></tr>
<tr><th>(0,5%)</th><th>(10%)</th><th>(50%)</th><th>(100%)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td rowspan="2">Piutang Pajak (self assessment)</td><td rowspan="2">< 1 Thn</td><td>≥ 1 s.d 2</td><td>> 2 s.d 5</td><td rowspan="2">> 5 Thn</td></tr>
<tr><td>Thn</td><td>Thn</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td rowspan="2">Piutang Pajak (official assessment)</td><td rowspan="2">< 1 Thn</td><td>≥ 1 s.d 2</td><td>> 2 s.d 5</td><td rowspan="2">> 5 Thn</td></tr>
<tr><td>Thn</td><td>Thn</td></tr>
<tr><td>3.</td><td></td><td>< 1 bulan</td><td>≥ 1 s.d 3</td><td>> 3 s.d 12</td><td>> 12</td></tr>
</table>

No.	Jenis Piutang	Kualitas/Umur Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
		(0,5%)	(10%)	(50%)	(100%)
	Piutang Bukan Pajak Khusus Untuk Objek Retribusi		bulan	bulan	bulan
4.	Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi	Belum dilakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo	1 bulan terhitung sejak surat tagihan pertama	1 bulan terhitung sejak surat tagihan kedua	1 bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga

Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung menurut persentase masing-masing kualitas piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

a. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

Kualitas lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang kurang dari 1(satu) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
1) Umur piutang diatas 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

Kualitas Macet, dengan kriteria:
1) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

b. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

Kualitas Lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
1) Umur piutang di atas 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

Kualitas Macet, dengan kriteria:
1) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

c. Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan:

Kualitas Lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3(tiga) bulan; dan/atau
2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

Kualitas Macet, dengan kriteria:
1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) ; dan/atau
2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

d. Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi:
1) Kualitas Lancar, apabila belum melakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagiah Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;
4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Pada tanggal pelaporan berikutnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Terhadap piutang-piutang yang telah lama dan sulit untuk ditagih akan dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dilakukan proses penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beban Dibayar Dimuka adalah piutang yang timbul akibat pemerintah provinsi telah melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pihak ketiga tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah Provinsi.

Beban Dibayar dimuka antara lain meliputi pembayaran sewa yang belum jatuh tempo dan premi asuransi yang belum jatuh tempo.

Beban Dibayar Dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Pencatatan Beban Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan untuk menunjukkan bagian beban yang belum diterima/dinikmati untuk dicatat menjadi Beban Dibayar di Muka.

Beban Dibayar Dimuka diukur sesuai dengan nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah provinsi, namun pemerintah provinsi telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Beban Dibayar Dimuka dihitung berdasarkan masa/periode manfaat beban tersebut secara harian dengan jumlah hari 360 hari dalam satu tahun.

Beban Dibayar Dimuka disajikan pada Neraca dalam kelompok aset lancar.

7.4.2.11.1.3 Penyajian dan Pengungkapan

Piutang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi piutang.

Piutang TP/TGR disajikan:

a. Kelompok jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan mendatang, disajikan sebagai Piutang TP/TGR pada Aset Lancar;
b. Kelompok jumlah yang akan diterima lebih dari 12 (dua belas) bulan mendatang, disajikan sebagai TP/TGR pada Aset Lainnya.

Piutang yang telah dilimpahkan penagihannya ke KPKNL tetap dicatat sebagai aset di neraca dan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
d. Informasi lain yang dianggap perlu.

Piutang yang telah dihapusbukukan tetap harus dipelihara pencatatannya secara *extracomptable*.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan diantaranya adalah jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

7.4.2.11.2. Penyisihan Piutang

7.4.2.11.2.1 Penentuan Besaran Penyisihan Piutang

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

7.4.2.11.2.2 Penghapusan Piutang

Penghapusan piutang terdiri atas:

a. Penghapusbukuan piutang atau penghapusan bersyarat piutang; dan
b. Penghapustagihan piutang atau penghapusan mutlak piutang.

Penghapusbukuan piutang atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

a. Piutang melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; atau
b. Debitur tidak melakukan pelunasan 1(satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; atau
c. Debitur mengalami musibah (*force majeure*); atau
d. Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaanya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau

e. Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; atau
f. Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; atau
g. Debitur yang tidak diketahui keberadaanya lagi karena:
   1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; atau
   2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; atau
h. Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/pernyataan Gubernur (Pemerintah Daerah setempat atau lainnya); atau
i. Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

Tata cara penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlakuan akuntansi penghapusbukuan piutang atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih.

Penghapusbukuan piutang atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunan tarif bunga kredit;
e. Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;
f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan *write off* di negara lain;
g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Tata cara penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Penghapustagihan piutang atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

7.4.2.12. Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir

7.4.2.12.1. Dana Bergulir

Dana Bergulir diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 7.4.4 Investasi Dana Bergulir

Kode Rekening	Uraian	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.1.05	Dana Bergulir	-	√

Tabel 7.4.5 Pendapatan Hasil Dana Bergulir

Kode Rekening		Uraian	Kewenangan	
LRA	LO		SKPD	SKPKD
4.1.4	7.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	-	√
4.1.4.07	7.1.4.07	Pendapatan Bunga	-	√

Dana Bergulir yang disisihkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pelayanan masyarakat, dimasukkan dalam kelompok investasi jangka panjang non permanen.

Alokasi anggaran untuk Dana Bergulir dimasukkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada DPA-PPKD, dan aset yang diperoleh dari Pengeluaran Pembiayaan tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang non permanen. Penagihan kembali dana bergulir dimasukkan sebagai Penerimaan Pembiayaan.

7.4.2.12.1.1 Pengakuan

Realisasi pengeluaran untuk dana bergulir dicatat jika telah terjadi pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.

Dana Bergulir dapat diakui bila memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

a. Merupakan bagian dari keuangan Provinsi Kepulauan Riau;
b. Dicantumkan dalam APBD sebagai pengeluaran pembiayaan pada DPA-SKPD PPKD;
c. Dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
d. Merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/ kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);
e. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menarik kembali dana bergulir.

Dana Bergulir disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada masyarakat dan dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dana Bergulir

dialokasikan pada pos Pengeluaran Pembiayaan dan penagihannya pada pos Penerimaan Pembiayaan. Dana tersebut dilaporkan sebagai Investasi Dana Bergulir pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pengembalian dana kepada pengelola dana bergulir dapat dilakukan dengan cicilan atau pengembalian sekaligus.

Dana bergulir yang ditarik dari masyarakat dapat terdiri dari dua unsur yaitu dana yang berasal dari pinjaman pokok dan pendapatan berupa bunga atau bagi hasil.

Besaran cicilan pokok yang dibayar oleh masyarakat adalah sebesar pinjaman dana yang diterima dengan memperhitungkan jangka waktu pengembalian.

Besaran pendapatan yang dibayar kepada pengelola dana bergulir adalah sebesar suku bunga atau bagi hasil yang disepakati antara penerima dana dengan pengelola dana bergulir.

7.4.2.12.1.2 Pengukuran

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat adanya perolehan aset berupa dana bergulir sebesar perolehan atau pengeluaran pembiayaan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Nilai yang dapat direalisasikan dapat diperoleh jika pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.

Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

7.4.2.12.1.3 Penyajian dan Pengungkapan

Dana Bergulir disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi dana bergulir.

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Pendapatan hasil dari pengelolaan dana bergulir yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disajikan sebagai Lain-Lain PAD Yang Sah-LO dan Lain-Lain PAD Yang Sah-LRA.

Pengungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

a. Dasar penilaian dana bergulir;
b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih;

c. Besarnya suku bunga yang dikenakan;
d. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir; dan
f. Informasi lain yang dianggap perlu.

7.4.2.12.2. Penyisihan Dana Bergulir

7.4.2.12.2.1 Penentuan Besaran Penyisihan Piutang

Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

7.4.2.12.2.2 Penghapusan Dana Bergulir

Penghapusan dana bergulir terdiri atas:
a. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
b. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir.

Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
a. Dana bergulir melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet; atau
b. Debitur tidak melakukan pelunasan 1(satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; atau
c. Debitur mengalami musibah (force majeure); atau
d. Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaanya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
e. Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; atau
f. Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; atau
g. Debitur yang tidak diketahui keberadaanya lagi karena:
    1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; atau
    2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang;
h. Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana

alam, kebakaran dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/pernyataan Gubernur (Pemerintah Daerah setempat atau lainnya); atau

i. Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.

Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar.
b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunan tarif bunga kredit.
e. Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang.
f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Tata cara penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

7.4.2.13. Persediaan

Persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 7.4.6 Klasifikasi Persediaan

Kode Rekening	Uraian		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.1.12	Persediaan			
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	Bahan	√	-
		Suku Cadang	√	-
		Alat/Bahan untuk kegiatan kantor	√	-
		Obat-obatan	√	-
		Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	√	-
		Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	√	-
		Natura dan Pakan	√	-
		Persediaan Penelitian	√	-
		Persediaan Dalam Proses	√	-
1.1.12.02	Barang Tak Habis Pakai	Komponen	√	-
		Pipa	√	-
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	√	-

Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor; barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa; dan barang bekas pakai seperti komponen dan pipa bekas.

Dalam hal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Persediaan dapat terdiri dari:

a. Barang Konsumsi;
b. Amunisi;
c. Bahan untuk pemeliharaan;
d. Suku cadang;
e. Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
f. Pita cukai dan leges;
g. Bahan baku;

h. Barang dalam proses/setengah jadi;
i. Tanah/bangunan untuk dijual/diserahkan kepada Kabupaten/Kota/masyarakat;
j. Jalan, Jaringan dan Irigasi untuk diserahkan kepada Kabupaten/Kota/masyarakat; dan
k. Hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan kepada Kabupaten/Kota/masyarakat.

Dalam suatu transaksi keuangan dimana pengeluaran yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk tujuan cadangan strategis/berjaga-jaga, barang-barang yang diperoleh diakui sebagai persediaan. Sebagai contoh pemerintah membeli bahan bakar minyak sebagai cadangan energi dan membeli beras untuk cadangan pangan. Begitu juga dengan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.2.13.1. Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:
a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;
b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO.

1. Pengakuan Beban Persediaan

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:
a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
   SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diungggulkan pelaporan atas

persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

2. Selisih Persediaan

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sering terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

7.4.2.13.2. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga/rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

Nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*).

7.4.2.13.3. Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan persediaan adalah:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

7.4.2.14. Investasi

Investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 7.4.7 Klasifikasi Investasi

Kode Rekening	Uraian		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Deposito	-	√
		Investasi Jangka Pendek BLUD	-	√
		Investasi Jangka Pendek Lainnya	-	√
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	-	√
		Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	√
		Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	√
		Dana Bergulir	-	√
		Deposito Jangka Panjang	-	√
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal Kepada BUMD	-	√
		Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	√
		Investasi Permanen Lainnya	-	√

Investasi diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

a. Investasi Jangka Pendek

   Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya beresiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.
b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen
   Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
2) Investasi Jangka Panjang Permanen
   Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

7.4.2.14.1. Pengakuan Investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Memungkinkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperoleh manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

7.4.2.14.2. Pengukuran

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasi adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran investasi jangka pendek:
   1) Investasi dalam bentuk surat berharga:
      a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
      b) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
   2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.
b. Pengukuran investasi jangka panjang:
   1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
   2) Investasi non permanen:
      a) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
      b) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
      c) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode berdasarkan kriteria tertentu, sebagai berikut:

Tabel 7.4.8 Metode Penilaian Investasi berdasarkan kriteria tertentu

No.	Metode	Kriteria
a.	Metode biaya	Kepemilikan kurang dari 20%
b.	Metode ekuitas	Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan
		Kepemilikan lebih dari 50%
c.	Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan	Kepemilikan bersifat non permanen

a. Metode biaya
   Investasi yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas
   Investasi yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
   Investasi yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

7.4.2.14.3. Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.2.14.4. Pelepasan Investasi

Pelepasan aset investasi pemerintah dapar berbentuk penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya.

Perbedaaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya diakui sebagai surplus/defisit pelepasan investasi. Surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

7.4.2.14.5. Penyajian dan Pengungkapan

Investasi jangka pendek disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi investasi.

Investasi jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari investasi jangka panjang yang kemudian dibagi ke dalam investasi nonpermanen dan investasi permanen sesuai klasifikasi investasi.

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
f. Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas;
g. Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi;
h. Kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggung jawab hukum;
i. Perubahan klasifikasi pos investasi;
j. Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi.

7.4.2.15. Aset Tetap

7.4.2.15.1. Aset Tetap

Aset Tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 7.4.9 Klasifikasi Aset Tetap

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.3.1	Tanah	Tanah Persil	√	-
		Tanah Non Persil	√	-
		Lapangan	√	-
1.3.2	Peralatan dan Mesin	Alat Besar	√	-
		Alat Angkutan	√	-
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	√	-
		Dst…	√	-
1.3.3	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung	√	-
		Monumen	√	-
		Bangunan Menara	√	-
		Dst…	√	-
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jalan dan Jembatan	√	-
		Bangunan Air Irigasi	√	-
		Instalasi	√	-
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	√	-
		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	√	-
		Hewan	√	-
		Dst…	√	-
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	√	-
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	√	-
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	√	-
		Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	√	-
		Dst…	√	-

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan, namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.

Penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets)* selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

7.4.2.15.1.1 Pengakuan

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 7.4.10 Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Kode Rekening	Uraian	Unit	Batasan Minimal Kapitalisasi
1.3.1	Tanah	unit	Rp 1,-
1.3.2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.01	Alat Besar		
	- Alat Besar Darat	unit	Rp 1.000.000,00
	- Alat Besar Apung	unit	Rp 1.000.000,00
	- Alat Bantu	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.02	Alat Angkutan		
	- Alat Angkutan Darat Bermotor	unit	Rp 1.000.000,00
	- Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	unit	Rp 1.000.000,00
	- Alat Angkutan Apung Bermotor	unit	Rp 1.000.000,00
	- Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	unit	Rp 1.000.000,00
	- Alat Angkutan Bermotor Udara	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.04	Alat Pertanian	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.08	Alat Laboratorium	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.09	Alat Persenjataan	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.10	Komputer	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.11	Alat eksplorasi	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.12	Alat Pengeboran	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.16	Alat Peraga	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.18	Rambu-rambu	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.19	Peralatan Olahraga	unit	Rp 1.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Unit	Batasan Minimal Kapitalisasi
1.3.3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:		
1.3.3.01	Bangunan Gedung	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.3.02	Monumen	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.3.03	Bangunan Menara	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:		
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.4.02	Bangunan Air	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.4.03	Instalasi	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.4.04	Jaringan	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:		
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	-	Rp 1,-
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	Rp 1,-
1.3.5.03	Hewan	-	Rp 1,-
1.3.5.04	Biota Perairan	-	Rp 1,-
1.3.5.05	Tanaman	-	Rp 1,-
1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	-	Rp 1,-
1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	Rp 20.000.000,00

Pengeluaran belanja modal yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi di atas dicatat sebagai aset *extracomptable*, tidak disajikan dalam neraca namun diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hasil dari perkembangbiakan hewan, ikan dan tanaman tidak disajikan di neraca tetapi dicatat sebagai aset *extracomptable*. Apabila hasil dari perkembangbiakan tersebut akan diserahkan kepada masyarakat, pencatatan atas hasil perkembangbiakan tersebut diakui sebagai persediaan.

Catatan dalam *extracomptable* berfungsi sebagai media pengendali.

1. Tanah

Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.

Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan.

a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
    1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
    2) Dalam hal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
    3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
    4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.

Pengakuan Peralatan dan Mesin dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan/atau bukti pembelian.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi dan lainnya.

Perolehan Gedung dan Bangunan yang belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.

Gedung dan bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Gedung dan Bangunan yang ada diatasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Gedung bertingkat terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering* (*lift*, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin *air conditioning*), dan komponen penunjang yang lain berupa saluran air dan telpon. *Air conditioning* dimaksudkan disini adalah berupa bangunan yang didalamnya berisi peralatan-peralatan *central air conditioning*.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, hibah/donasi, dan lainnya.

Jalan, Irigasi dan Jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang ada diatasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya diperoleh melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik, dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
b. Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir (a) di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomis renovasi kurang dari 1 (satu) tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.

c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir (a) dan (b) di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap–Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Belanja Operasional.

7.4.2.15.1.2 Pengukuran

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Komponen biaya perolehan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 7.4.11 Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Biaya perolehan tanah meliputi biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya perolehan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, pembongkaran dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
	Perolehan tanah yang dilakukan oleh panitia pengadaan, termasuk dalam harga perolehan tanah tersebut adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
Peralatan dan Mesin	Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Biaya perolehan Gedung dan Bangunan melalui swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langung termasuk perencanan, pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya seperti biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
	Biaya perolehan Gedung dan Bangunan melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, perizinan, jasa konsultan dan pajak.
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Biaya perolehan atau biaya konstruksi jalan irigasi dan jaringan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya konsultan, biaya pembongkaran diatas tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut siap pakai.

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Aset Tetap Lainnya	Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Aset Tetap Lainnya tersebut siap digunakan.
	Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan, pengawasan, sewa peralatan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak.
	Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, biaya perizinan dan pajak.

1. Pengukuran Aset Tetap per Jenis

a. Tanah

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Aset tetap berupa tanah, seluruh nilai perolehannya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

b. Peralatan dan Mesin

Pengukuran peralatan dan mesin berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian peralatan dan mesin dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai peralatan dan mesin didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar untuk peralatan dan mesin adalah harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal atau membandingkannya dengan harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama. Apabila harga pasar tidak tersedia maka digunakan nilai dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten (*appraisal*) dengan memperhitungkan faktor penyusutan. Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memakai perhitungan teknis.

c. Gedung dan Bangunan

Pengukuran Gedung dan Bangunan berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Gedung dan Bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran Gedung dan Bangunan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Gedung dan Bangunan.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

e. Aset Tetap Lainnya

Pengukuran Aset Tetap Lainnya berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap Lainnya dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap Lainnya didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap lainnya.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

2. Perolehan secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

3. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan *(impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

4. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

5. Pengeluaran setelah Perolehan

Perolehan setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap, yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas, yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, maka tidak dikapitalisai melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan (*expense*). Pengeluaran yang dikapitalisasi berupa penggantian utama merupakan pembaharuan bagian dari aset tetap atau nilai pemeliharaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.4.12 Nilai Pemeliharaan Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Nilai Pemeliharaan
1	Peralatan dan Mesin	50% dari nilai perolehan
2	Gedung dan Bangunan	10% dari nilai perolehan
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10% dari nilai perolehan

6. Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

7. Penyusutan

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Aset Tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya tidak perlu dilakukan penyusutan, yaitu aset tetap tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

Dalam kondisi tertentu tanah pun dapat disusutkan apabila fisik tanah tersebut tidak ada lagi, terutama tanah yang berada disekitar aliran sungai/tepi pantai yang sudah abrasi.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Perhitungan penyusutan aset tetap dimulai sejak tahun perolehan. Penyusutan dihitung secara bulanan meskipun baru diperoleh satu atau dua minggu atau bahkan satu hari.

Aset Tetap tidak diketahui tahun perolehannya, misalnya dikarenakan aset tetap tersebut merupakan aset lama yang baru terdata dan tercatat pada buku inventaris barang, maka belum dapat diperhitungkan penyusutannya namun harus diungkapkan di dalam CaLK.

Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diadakan untuk digunakan dalam kegiatan operasional, tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya serta tidak dimaksudkan dalam rangka penandingan antara biaya dengan pendapatan. Maka dalam hal ini nilai residu diabaikan dalam menghitung penyusutan meskipun terhadap suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya.

Penyusutan Aset Tetap dapat dilakukan terhadap Aset Tetap secara individual atau terhadap sekelompok aset sekaligus. Aset Tetap yang dapat disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:

a. Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama;
b. Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain (misalnya peralatan kesehatan kamera sinar x dan alat pencetakan film sinar x);
c. Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya komputer dan perangkat lunaknya);
d. Untuk kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, beberapa aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknis dan konteks pemanfaatannya, meskipun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung satu sama lain (misalnya peralatan bedah).

Apabila suatu aset tetap sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp.0,- namun secara teknis masih dapat dimanfaatkan, maka aset tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya serta tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan.

Aset Tetap yang sudah disusutkan seluruh nilainya dapat dihapuskan jika telah mendapat izin penghapusbukuan dari pejabat yang berwenang. Apabila dikemudian hari aset tetap tersebut akan dilelang untuk memberi pemasukan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka rencana pelelangan dicantumkan dalam anggaran dan realisasinya dicatat sebagai Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau.

Perkiraan masa manfaat untuk setiap Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 7.4.13 Perkiraan Masa Manfaat Aset Tetap

Kodefikasi						Uraian	Masa Manfaat
1	3					**ASET TETAP**	
1	3	2				**Peralatan dan Mesin**	
1	3	2	01			Alat Besar	
1	3	2	01	01		Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02		Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03		Alat Bantu	7
1	3	2	02			Alat Angkutan	
1	3	2	02	01		Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03		Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04		Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05		Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	03			Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01		Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02		Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03		Alat Ukur	5
1	3	2	04			Alat Pertanian	
1	3	2	04	01		Alat Pengolahan	4
1	3	2	05			Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01		Alat Kantor	5
1	3	2	05	02		Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06			Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	06	01		Alat Studio	5
1	3	2	06	02		Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03		Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04		Peralatan Komunikasi Navigasi	10
1	3	2	07			Alat Kedokteran dan Kesehatan	

Kodefikasi						Uraian	Masa Manfaat
1	3	2	07	01		Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	01	29	Alat Kedokteran Lainnya	10
1	3	2	07	02		Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08			Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01		Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03		Alat Peraga Praktik Sekolah	10
1	3	2	08	04		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	08	05		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06		Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1	3	2	08	07		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08		Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1	3	2	08	09		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	8
1	3	2	09			Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01		Senjata Api	10
1	3	2	09	02		Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	02	02	Non Senjata Api	5
1	3	2	09	03		Senjata Sinar	10
1	3	2	09	04		Alat Khusus Kepolisian	3
1	3	2	10			Komputer	
1	3	2	10	01		Komputer Unit	4
1	3	2	10	02		Peralatan Komputer	4
1	3	2	11			Alat eksplorasi	
1	3	2	11	01		Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	02		Alat Eksplorasi Geofisika	5
1	3	2	12			Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01		Alat Pengeboran Mesin	5
1	3	2	12	02		Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	3	2	13			Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	01		Sumur	4
1	3	2	13	02		Produksi	4
1	3	2	13	03		Pengolahan dan Pemurnian	5
1	3	2	14			Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01		Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	02		Alat Bantu Produksi	5
1	3	2	15			Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01		Alat Deteksi	4
1	3	2	15	02		Alat Pelindung	4

Kodefikasi						Uraian	Masa Manfaat
1	3	2	15	03		Alat SAR	4
1	3	2	15	04		Alat Kerja Penerbangan	5
1	3	2	16			Alat Peraga	
1	3	2	16	01		Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4
1	3	2	17			Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01		Unit Peralatan Proses/Produksi	4
1	3	2	18			Rambu-rambu	
1	3	2	18	01		Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	18	02		Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	7
1	3	2	18	03		Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	7
1	3	2	19			Peralatan Olahraga	
1	3	2	19	01		Peralatan Olahraga	4
1	3	3				**Gedung dan Bangunan**	
1	3	3	01			Bangunan Gedung	
1	3	3	01	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02			Monumen	
1	3	3	02	01		Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	03			Bangunan Menara	
1	3	3	03	01		Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04			Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	04	01		Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4				**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	
1	3	4	01			Jalan dan Jembatan	
1	3	4	01	01		Jalan	10
1	3	4	01	02		Jembatan	50
1	3	4	02			Bangunan Air	
1	3	4	02	01		Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02		Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03		Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	02	04		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06		Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	02	07		Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03			Instalasi	
1	3	4	03	01		Instalasi Air Bersih/Air Baku	30

Kodefikasi						Uraian	Masa Manfaat
1	3	4	03	02		Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03		Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05		Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06		Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	08		Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09		Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10		Instalasi Lain	20
1	3	4	04			Jaringan	
1	3	4	04	01		Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02		Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03		Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04		Jaringan Gas	30

8. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

9. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Kebijakan ini tidak mengharuskan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

10. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila suatu aset tidak dapat digunakan lagi secara permanen dikarenakan berbagai alasan namun masih memiliki masa manfaat, maka aset tersebut dapat dipindahkan ke dalam kelompok Aset Lain- Lain sesuai dengan nilai tercatatnya. Namun apabila suatu aset tidak dapat digunakan sementara maka aset tersebut tidak dipindahkan ke dalam kelompok Aset Lain-lain.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kerugian penghentian aset tetap dibebankan pada defisit dari kegiatan non operasional.

Nilai pelepasan aset tetap dicatat sebagai lain-lain PAD yang sah.

Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.

Dokumen sumber pencatatan pelepasan aset tetap mengikuti ketentuan Peraturan Gubernur yang mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah.

Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dikeluarkan dari aset tetap pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan/atau Berita Acara Serah Terima. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan berita acara serah terima, maka pada saat aset tetap dinyatakan sebagai penyertaan modal, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap tersebut menjadi aset lainnya (aset tetap masih dalam proses penyertaan modal).

Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan Operasional (LO). Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai lain-lain PAD yang sah dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Dan dicatat ke dalam Surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

7.4.2.15.1.3 Penyajian dan Pengungkapan

Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
   1) Penambahan;
   2) Pelepasan;
   3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
   4) Mutasi aset tetap lainnya.
c. Informasi penyusutan, meliputi:
   1) Nilai penyusutan;
   2) Metode penyusutan yang digunakan;
   3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
   4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
   1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
   2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
   3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
   4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
e. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:
   1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
   2) Tanggal efektif penilaian kembali;
   3) Jika ada, nama penilai independen;
   4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
   5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
f. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

7.4.2.15.2. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 7.4.14 Klasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tanah Dalam Pengerjaan	√	-
		Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	√	-
		Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	√	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pengerjaan	√	-
		Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	√	-

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya

dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

7.4.2.15.2.1 Pengakuan

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan, direpresentasikan dengan dokumen berita acara serah terima (BAST) atau dokumen sejenis dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa; dan
b. dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

7.4.2.15.2.2 Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan, yaitu dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Untuk keperluan neraca awal, dokumen sumber untuk mencatat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan ini adalah akumulasi seluruh nilai SP2D yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal neraca.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

a. biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

a. asuransi;

b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi, yang dialokasikan dengan menggunakan metode sistematis dan rasional.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

7.4.2.15.2.3 Penyajian dan Pengungkapan

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset tetap.

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
d. Uang muka kerja yang diberikan;
e. Retensi.

Apabila Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak dilanjutkan (dihentikan sementara atau akan dihentikan permanen) harus diungkapkan dalam CaLK. Jika penanggung jawab aset (dalam hal ini adalah Gubernur) mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan tersebut secara permanen, maka harus diterbitkan surat keputusan Gubernur terkait penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

7.4.2.16. Dana Cadangan

Dana cadangan diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 7.4.15 Dana Cadangan

Kode Rekening	Uraian		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.4.1.01	Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan	-	√
		Dana Cadangan Pembangunan Gedung	-	√
		Dana Cadangan Pembangunan Waduk	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)	-	√
		Dst….	-	√

Tabel 7.4.16 Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Kode Rekening		Uraian		Kewenangan	
LRA	LO			SKPD	SKPKD
4.1.4.05	7.1.4.05	Penerimaan Jasa Giro	Penerimaan Jasa Giro Dana Cadangan….	-	√

7.4.2.16.1. Pengakuan

Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau ke Rekening Dana Cadangan yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.

Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang didalamnya mencakup:
a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
d. Sumber dana cadangan; dan
e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
f. Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
g. Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.

Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada program kegiatan yang sudah direncanakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

7.4.2.16.2. Pengukuran

Pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal. Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal. Hasil pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

7.4.2.16.3. Penyajian dan Pengungkapan

Dana Cadangan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset.

Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bagi hasil diperlakukan sebagai penambah dana cadangan dan dikapitalisasi ke dana cadangan.

Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain PAD yang Sah-jasa giro/bagi hasil dana cadangan, dan dicatat sebagai Pendapatan-LO dalam pos Lain-lain PAD yang Sah- jasa giro/bagi hasil dana cadangan.

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Dasar hukum (Perda) pembentukan dana cadangan;
b. Tujuan pembentukan dana cadangan;
c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
e. Sumber dana cadangan; dan
f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

7.4.2.17. Aset Lainnya

Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 7.4.17 Klasifikasi Aset Lainnya

Kode Rekening	Uraian		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran	√	√
		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	√	√
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa	√	√
		Kerjasama Pemanfaatan	√	√
		Bangun Guna Serah	√	√
		Bangun Serah Guna	√	√
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	Goodwill	√	-
		Lisensi dan Frenchise	√	-
		Hak Cipta	√	-
		Paten	√	-
		Aset Tidak Berwujud Lainnya	√	-

Kode Rekening	Uraian		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	√	-
1.5.4	Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain	√	√

7.4.2.17.1. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang
   1) Tagihan Penjualan Angsuran
      Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan dinas dan penjualan rumah golongan III.
   2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
      Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
   Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
   1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa
      Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
   2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
      Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya-KSP.
   3) Bangun Guna Serah – BGS(*Build, Operate, Transfer* – BOT)
      Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk Kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riaukepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO)
   Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
   BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/ dioperasikan.Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disertai dengan kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)
   Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

   1) Goodwill
   Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

   2) Hak Paten atau Hak Cipta
   Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

   3) Royalti
   Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

   4) Software
   Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

   5) Lisensi
   Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
7) Aset Tak Berwujud Lainnya
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:
1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau dinikmati oleh entitas; dan
2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

d. Aset Lain-Lain
1) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
2) Kas Yang Dibatasi Penggunannya merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah.
3) Piutang yang timbul dari kegiatan yang pengakuannya tidak dapat diklasifikasikan pada piutang pajak, piutang restribusi maupun piutang lainnya.

7.4.2.17.2. Pengukuran

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
2. Tuntutan ganti rugi kerugian daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
   a. Sewa
   Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
   b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT)
   BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
d. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)
   BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

4. Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
   1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
   2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
   3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
d. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

5. Aset Lain-lain
   a. Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

b. Kas Yang Dibatasi Penggunannya merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah, diukur menurut saldo deposito ditambah dengan pendapatan bunga atas deposito tersebut.
c. Piutang yang timbul dari kegiatan yang pengakuannya tidak dapat diklasifikasikan pada piutang pajak, piutang restribusi maupun piutang lainnya, disajikan sebesar nilai nominal yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

7.4.2.17.3. Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas akan di amortisasi sebesar nilai Perolehannya pada saat Aset tersebut tidak memberi manfaat dalam Operasional entitas.

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

Aset Tak Berwujud berupa Kajian dihitung amortisasinya berdasarkan periode manfaat pada dokumen kajian tersebut.

7.4.2.17.4. Penyajian dan Pengungkapan

Aset Lainnya disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset lainnya.

Pengungkapan Aset Lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
a. Besaran dan rincian aset lainnya;
b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
c. Informasi lainnya yang penting.

7.4.2.18. Aset Konsesi Jasa

7.4.2.18.1. Pengakuan dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
b. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa adalah selama masa manfaat/umur aset tersebut.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra selama umur aset sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Apabila Aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memenuhi kondisi persyaratan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.

Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset.

Suatu konstruksi aset yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan publik sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya.

Komponen aset konsesi jasa disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset tersebut, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.

Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi aset.

Reklasifikasi aset diukur menggunakan nilai tercatat aset.

7.4.2.18.2. Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban

Pada saat pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakui aset konsesi jasa, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga mengakui kewajiban.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.

Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa, kemudian disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan dari Pemerintah Kepulauan Riau kepada mitra, atau dari mitra kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan/atau hukum perjanjian yang relevan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa sebagai bentuk pertukaran, melalui skema atau skema kombinasi dari:

a. Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);
b. Pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*), misalnya:

(i) Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
(ii) Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jasa layanan publik.

7.4.2.18.3. Skema Kewajiban Keuangan

Dalam hal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakui kewajiban.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas, jika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:
a. Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau
b. Jika ada kekurangan antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu tergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas/kuantitas/efisiensi.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayarannya berdasarkan substansi pembayaran sebagai:
a. pengurang nilai pengakuan kewajiban;
b. bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
c. bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.

Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban pada Laporan Operasional.

Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah maka komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik.

Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah maka komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada mitra ditentukan dengan estimasi/perkiraan sebesar nilai wajar.

7.4.2.18.4. Skema Pemberian Hak Usaha Kepada Mitra

Dalam hal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak

ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat pengakuan kewajiban sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mitra.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.

Pada saat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan.

Pada saat hak diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban - pendapatan tangguhan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan skema pemberian hak usaha kepada mitra dalam hal pembayaran sehubungan pemakaian aset konsesi jasa dimana jasa publik tersebut dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat maka pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban – pendapatan tangguhan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa yang diakui sebagai beban dalam Laporan Operasional.

7.4.2.18.5. Membagi Perjanjian

Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat kewajiban berdasarkan masing-masing skema.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat pendapatan lainnya selain dari pendapatan diatas berpedoman pada standar akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.

7.4.2.18.6. Penyajian dan Pengungkapan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat seluruh aspek perjanjian konsensi jasa dengan pengungkapan yang memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemberi jasa/mitra menyampaikan laporan berupa informasi terkait dengan perjanjian konsensi jasa pada setiap periode pelaporan. Informasi yang diberikan berupa:

a. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
b. Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).
c. Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
    (i) Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
    (ii) Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
    (iii) Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
    (iv) Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
    (v) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
    (vi) Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (*overhaul*);
    (vii) Ketentuan pemberian izin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
d. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

Pengungkapan disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa.

7.4.2.19. Properti Investasi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial, baik untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa.

Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Secara klasifikasi, aset tetap suatu Barang Milik Daerah (BMD) terdiri dari aset tetap berupa BMD tanah dan/atau BMD gedung dan bangunan.

Selanjutnya, agar suatu BMD yang dicatat sebagai pos aset tetap tanah dan/atau gedung dan bangunan memenuhi pengertian properti investasi, perlu dilakukan identifikasi karakteristik kondisinya. Penilaian karakteristik tersebut terutama melihat intensi atau niat penggunaan aset. Intensi ini harus ditetapkan dalam keputusan kepala daerah agar tanah dan/atau bangunan tersebut dapat dicatat sebagai properti investasi.

Contoh kondisi BMD yang dapat menjadi properti investasi antara lain:

a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
c. bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

Contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan tidak termasuk dalam ruang lingkup kebijakan ini adalah sebagai berikut:

a. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
b. properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
c. properti yang digunakan sendiri termasuk properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
d. properti yang disewakan kepada pemerintah/lembaga lain dengan cara sewa pembiayaan;

e. properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar. Misalnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
f. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis;
g. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempertanggung-jawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut diakui secara penuh sebagai properti investasi jika memenuhi kriteria signifikansi properti investasi yaitu:
a. luasan area bagian yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa menempati perbandingan 3:4 (75%) luasan area dari area bagian properti digunakan sendiri (25%); atau
b. intensitas yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari pihak eksternal yang tidak memenuhi properti yang digunakan sendiri dengan perbandingan 3:4 (75%) dari intensitas properti digunakan sendiri (25%).

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan kriteria aset properti investasi.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat mengakui properti investasi jika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap.

Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

7.4.2.19.1. Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pengakuan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas

aliran manfaat ekonomi dan resiko yang terkait dengan properti investasi tersebut di masa depan berdasarkan bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah yang tersedia pada waktu pengakuan awal dan dituangkan dalam berita acara penetapan properti investasi sebagai dasar penetapan keputusan kepala daerah.

Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya.

Biaya properti investasi pada awal perolehan dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi.

Biaya atas perawatan properti investasi berupa biaya perbaikan dan pemeliharaan properti, diakui sebagai surplus atau defisit di Laporan Operasional pada saat terjadi. Biaya tersebut meliputi biaya tenaga kerja, barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.

Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Misalnya, penggantian interior dinding bangunan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakui jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi.

Jumlah tercatat properti investasi yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian.

7.4.2.19.2. Pengukuran

1. Saat Pengakuan Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.

Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.

Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya sebagai berikut:

a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa, diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dimana aset diakui pada nilai mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Terhadap nilai yang setara diakui sebagai kewajiban atau liabilitas.

Premi yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas.

Hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi. Hak atas properti dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.

Properti investasi yang diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter dihitung dari nilai wajar kecuali:

a. transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau;
b. nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal, maka biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

Apabila transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempertimbangkan potensi jasa di masa yang akan datang.

Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:

a. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
b. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut.

Properti investasi yang diperoleh dari entitas Akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas Akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

2. Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mengatur Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi.

Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

Peningkatan dan penurunan nilai properti investasi akibat revaluasi, diakui dalam ekuitas.

Properti Investasi dinilai sebesar nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa.

3. Alih Guna

Alih guna properti investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan:

a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalihkan penggunaan properti investasi menjadi aset tetap;
b. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengembangkan properti investasi untuk dijual, mengalihkan penggunaan dari properti investasi menjadi persediaan;
c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas Akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

4. Pelepasan

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan.

Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil netto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan aset.

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

7.4.2.19.3. Penyajian

Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.

Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menyewakan dan/atau menjual properti investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7.4.2.19.4. Pengungkapan

Properti investasi diungkapkan dalam laporan keuangan sebagai berikut:

a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
b. metode penyusutan yang digunakan;
c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
   (i) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
   (ii) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
   (iii) pelepasan;
   (iv) penyusutan;
   (v) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
   (vi) perubahan lain.
f. Pelaksanaan revaluasi atas properti investasi, harus mengungkapkan:
   (i) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
   (ii) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
   (iii) tanggal efektif penilaian kembali;
   (iv) nilai tercatat sebelum revaluasi
   (v) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;

(vi) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.

g. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
h. Kriteria klasifikasi atas properti investasi yang digunakan sendiri dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
i. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar didukung oleh bukti pasar atau faktor lain;
j. jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
   (i) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
   (ii) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
   (iii) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
k. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
l. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

7.4.2.20. Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan

7.4.2.20.1. Pemilihan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi

Ketika suatu PSAP secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, maka kebijakan akuntansi yang diterapkan menggunakan PSAP dimaksud.

Standar Akuntansi Pemerintahan menentukan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi relevan dan andal atas transaksi, peristiwa dan kondisi lain. Kebijakan akuntansi tersebut tidak perlu diterapkan ketika dampak penerapannya tidak material. Akan tetapi, adalah tidak tepat untuk membuat, atau membiarkan ketidaktepatan, penyimpangan dari SAP untuk mencapai suatu penyajian tertentu atas posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas.

Dalam hal tidak ada PSAP yang secara spesifik mengatur transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, entitas menggunakan pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi, dengan mengacu pada sumber-sumber berikut ini, dengan hierarki:

a. Ketentuan dalam PSAP yang mengatur hal serupa dan berhubungan dengan kondisi, situasi atau transaksi terkait;
b. Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, arus kas dan perubahan ekuitas yang dijelaskan dalam Kerangka Konseptual.

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dinyatakan dalam paragraf diatas, entitas juga dapat mempertimbangkan (a) pernyataan standar terkini yang diterbitkan oleh penyusun standar dan (b) praktik akuntansi yang sehat dan berterima umum baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta, tetapi hanya sebatas yang tidak bertentangan dengan sumber-

sumber sebagaimana dinyatakan dalam paragraf diatas. Contoh pernyataan standar terkini diantaranya adalah pernyataan yang diterbitkan oleh *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB).

7.4.2.20.2. Konsistensi Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa lainnya, dan kondisi yang sejenis, kecuali suatu PSAP secara spesifik mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda merupakan hal yang tepat. Jika suatu PSAP mengizinkan pengelompokan tersebut, maka suatu kebijakan akuntansi yang tepat harus dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok tersebut.

7.4.2.20.3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengubah kebijakan akuntansi hanya apabila:

a. Disyaratkan oleh suatu PSAP, atau
b. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan terkait dengan pengaruh transaksi, peristiwa serta kondisi lain dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pengguna laporan keuangan diharapkan mampu membandingkan laporan keuangan suatu entitas antarperiode untuk mengidentifikasi perubahan posisi keuangan, kinerja dan arus kasnya. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang sama diterapkan untuk setiap periode dan dari satu periode ke periode berikutnya, kecuali perubahan dalam kebijakan akuntansi tersebut memenuhi kriteria sebagaimana paragraf diatas.

Suatu perubahan dari satu basis akuntansi ke basis akuntansi lainnya termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan dalam perlakuan akuntansi, pengakuan, atau pengukuran suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi dalam satu basis akuntansi dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi.

Tidak termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi:

a. Penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang berbeda secara substansi dari penerapan sebelumnya; dan
b. Penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang tidak terjadi sebelumnya.

7.4.2.20.4. Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Apabila Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan tersebut untuk seluruh periode sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menentukan dampak kumulatif mulai periode yang paling memungkinkan dalam menerapkan kebijakan baru, maka:

a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat penerapan awal suatu PSAP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAP tersebut, jika ada, dan

b. Jika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAP yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif.

Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif sesuai paragraf diatas, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyesuaikan saldo awal ekuitas dan setiap komponen yang terpengaruh untuk periode penyajian tahun berjalan seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya.

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi, penerapan retrospektif disyaratkan tanpa melakukan penyajian kembali laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit.

Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Neraca, dan/atau Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan tersebut untuk seluruh periode sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menentukan dampak kumulatif mulai periode yang paling memungkinkan dalam menerapkan kebijakan baru.

Dalam hal penerapan retrospektif tidak praktis dilakukan, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menerapkan secara prospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi sejak tanggal praktis paling awal.

Penerapan retrospektif tidak praktis jika dampak kumulatif atas penerapan perubahan kebijakan tidak dapat ditentukan secara obyektif untuk seluruh periode sebelumnya atau membutuhkan biaya dan tenaga yang besar.

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi atau basis akuntansi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak menyajikan kembali laporan keuangan periode terakhir dengan kebijakan akuntansi atau basis akuntansi yang baru. Laporan keuangan periode sebelumnya disandingkan dengan laporan periode berjalan dengan kebijakan akuntansi atau basis standar akuntansi masing-masing.

7.4.2.20.5. Pengungkapan

Bila Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan perubahan kebijakan akuntansi maka perlu mengungkapkan:

a. sifat perubahan kebijakan akuntansi;
b. alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang lebih andal dan relevan;
c. nilai penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang terdampak perubahan kebijakan akuntansi untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan, sepanjang memungkinkan;
d. laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulangi pengungkapan yang sama; dan

e. dalam hal perubahan kebijakan akuntansi disebabkan adanya penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang baru, maka pengungkapan ditambahkan dengan judul standar yang baru dan tanggal efektif penerapan standar tersebut.

7.4.2.20.6. Kesalahan

Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan antara lain karena:

a. keterlambatan bukti transaksi;
b. kesalahan perhitungan matematis;
c. kesalahan penerapan kebijakan akuntansi;
d. kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; serta
e. kecurangan.

Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan.

Setiap kesalahan harus dilakukan penyesuaian/dikoreksi segera setelah diketahui.

Kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periode-periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun aset bersangkutan dan akun lain yang terkait.

Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LRA dan belanja yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.

Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LO dan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi pada akun ekuitas dan akun neraca terkait.

Kesalahan atas pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.

Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kewajiban yang bersangkutan dan akun terkait.

Koreksi atas kesalahan yang terjadi setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai sebagaimana yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan auditor eksternal atau tanggal saat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

7.4.2.20.7. Pengembalian Kelebihan Penerimaan Pendapatan

Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun berjalan.

Dalam suatu operasi normal pemerintah dapat terjadi pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan, baik pada tahun berjalan maupun pada saat laporan keuangan telah diotorisasi terbit. Pengembalian penerimaan pendapatan setelah laporan keuangan diotorisasi bukan merupakan kesalahan periode sebelumnya, sehingga pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan tersebut tidak diperlakukan sebagai koreksi kesalahan sebagaimana diatur dalam paragraf diatas, namun sebagai pengurang realisasi pendapatan LRA maupun pendapatan LO tahun berjalan.

7.4.2.20.8. Perubahan Estimasi Akuntansi

Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat diukur dengan tepat, sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi umur ekonomis, estimasi ketertagihan, dan estimasi akuntansi yang lain. Estimasi mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir. Estimasi diperlukan antara lain dalam menentukan:

a. Persediaan usang.
b. Penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih.
c. Masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau potensi jasa yang berasal dari aset yang disusutkan/diamortisasi.
d. Pendapatan pajak;
e. Kewajiban garansi.

Metode estimasi terpilih dan alasan pilihan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Estimasi perlu direvisi jika terjadi perubahan terhadap pertimbangan yang menjadi dasar estimasi dibuat atau terdapat informasi baru atau berdasarkan pengalaman yang relevan. Berdasarkan karakteristiknya, perubahan estimasi tidak terkait dengan periode sebelumnya dan bukan merupakan koreksi kesalahan.

Perubahan estimasi dan alasan perubahan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan secara prospektif pada pada laporan keuangan pada periode perubahan dan periode selanjutnya yang terpengaruh.

Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan kewajiban, atau terkait dengan suatu pos ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, kewajiban atau ekuitas yang terkait pada perode perubahan.

Pengaruh perubahan terhadap Laporan Operasional periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

7.4.2.20.9. Operasi Yang Dihentikan

Operasi yang dihentikan antara lain berupa:

a. Entitas pelaporan/entitas akuntansi yang dihentikan operasinya berdasarkan ketentuan perundangan atau penetapan pemerintah.
b. Penghentian tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek yang signifikan mempengaruhi laporan keuangan entitas pelaporan/entitas akuntansi.

Informasi penting dalam operasi yang dihentikan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi penting terkait operasi yang dihentikan mengungkapkan dasar peraturan atau ketetapan penghentian operasi entitas pemerintah, tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek, tanggal pasti penghentian, pengalihan aset atau kewajiban, dan pengalihan pendapatan dan beban.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan disajikan dalam laporan keuangan komparatif walaupun bersaldo nol.

Pendapatan dan beban atas operasi yang dihentikan dalam periode tahun berjalan sampai dengan tanggal penghentian, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot atau pergantian kebutuhan lain.
b. Fungsi tersebut tetap ada.
c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
d. Menutup suatu fasilitas yang pemanfaatannya amat rendah, dalam rangka menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

7.4.2.21. Kewajiban

Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 7.4.18 Klasifikasi Kewajiban

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
2.1	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	√	√
2.1.02	Utang Bunga	-	√
2.1.03	Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	√
2.1.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	√
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	√	√
2.1.06	Utang Belanja	√	√
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	√	√
2.2	Kewajiban Jangka Panjang		

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
2.2.01	Utang kepada Pemerintah Pusat	-	√
2.2.02	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	√
2.2.03	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	-	√
2.2.04	Utang kepada Masyarakat (Obligasi)	-	√

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

7.4.2.21.1. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*).
b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*).
c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).
d. Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan.

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban mengeluarkan

sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dalam suatu ketetapan perundangan penyaluran alokasinya belum dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau apabila dalam ketetapan tersebut tidak jelas dinyatakan sebagai transaksi utang-piutang.

Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah dan dicatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

7.4.2.21.2. Pengukuran

Kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan sebagai berikut:

a. Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)
   - Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
   - Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.
b. Utang Transfer
   Utang transfer adalah kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c. Utang Bunga (*Accrued Interest*)
   Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
d. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
   - Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
   - Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan bila masih terdapat saldo

pungutan/potongan yang belum disetor kepada pihak lain, maka jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
   Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
f. Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)
   Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan dalam 2 (dua) karakteristik sebagai berikut:

a. Utang yang tidak diperjualbelikan (*Non-Traded Debt*)
   Utang yang tidak diperjualbelikan merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.
b. Utang yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)
   - Akuntansi untuk utang pemerintah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari pemerintah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya, dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban pemerintah.
   - Utang yang dapat diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah.
   - Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
   - Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto atau premium harus dinilai sebesar nilai pari.
   - Sekuritas utang pemerintah yang dijual dengan harga diskonto nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo.
   - Sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

7.4.2.21.3. Perubahan Valuta Asing

a. Utang dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.
b. Pada setiap tanggal neraca pos utang dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan mengunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
c. Selisih penjabaran pos utang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

7.4.2.21.4. Tunggakan

a. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal.

b. Jumlah tunggakan atas pinjaman harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

7.4.2.21.5. Penghapusan Utang

Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah uang debitur, apabila kreditur mengakui bahwa tidak ada kewajiban pada debitur.

7.4.2.21.6. Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari kewajiban sesuai klasifikasi kewajiban.

Utang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban adalah:

a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
    1) pengurangan pinjaman;
    2) modifikasi persyaratan utang;
    3) pengurangan tingkat bunga pinjaman;
    4) pengunduran jatuh tempo pinjaman;
    5) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
    6) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
g. Biaya pinjaman:
    1) Perlakuan biaya pinjaman;
    2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
    3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

7.4.2.22. Pendapatan - LRA dan Belanja

7.4.2.22.1. Pendapatan – LRA

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA

Tabel 7.4.19 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
4.1	Pendapatan Asli Daerah-LRA		
4.1.01	Pajak Daerah - LRA	√	-
4.1.02	Retribusi Daerah - LRA	√	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA	-	√
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LRA	√	-

b. Pendapatan Transfer

Tabel 7.4.20 Pendapatan Transfer

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
4.2	Pendapatan Transfer-LRA		
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	-	√

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tabel 7.4.21 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LRA		
4.3.01	Pendapatan Hibah-LRA	√	√
4.3.03	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LRA	√	√

7.4.2.22.1.1 Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

a. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau
b. Diterima oleh SKPD
c. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas nama Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pengakuan pendapatan mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan kas yang telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan Provinsi Kepulauan Riau dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
c. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk diakui sebagai pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib

melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk diakui sebagai pendapatan Provinsi Kepulauan Riau.

e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan otoritas yang diberikan oleh Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengakuan pendapatan diakui berdasarkan bukti dokumen sumber yang sah.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring)* atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Denda keterlambatan atas pekerjaan diakui sebagai realisasi Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada SKPD terkait.

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Pengakuan pendapatan transfer-LRA dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan transfer yang terkait dengan kurang salur dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi.

Pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan namun dilakukan penyetoran realisasinya, diakui sebagai realisasi pendapatan SKPD terkait sesuai klasifikasi pendapatan tersebut. Anggaran pendapatan yang belum ditetapkan akan diusulkan pada APBD Perubahan, namun apabila tidak dilakukan perubahan, realisasi tetap diakui sebagai pendapatan SKPD terkait sesuai klasifikasi pendapatan.

Pendapatan-LRA yang tidak diketahui sumber dan klasifikasinya diakui sebagai realisasi pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah pada SKPKD.

Entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

7.4.2.22.1.2 Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.

Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

7.4.2.22.1.3 Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

a. Penerimaan Pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LRA yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan-LRA;
d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.2.22.2. Belanja

Belanja diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 7.4.22 Klasifikasi Belanja

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
5.1	Belanja Operasi		
5.1.01	Belanja Pegawai	√	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	√	-
5.1.03	Belanja Bunga	-	√
5.1.04	Belanja Subsidi	-	√
5.1.05	Belanja Hibah (berupa uang)	√	√
5.1.05	Belanja Hibah (berupa barang dan jasa)	√	√
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial (berupa uang)	√	√
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial (berupa barang dan jasa)	√	√
5.2	Belanja Modal		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	√	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	√	-

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	√	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	√	-
5.2.05	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	√	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	√	-
5.3	Belanja Tidak Terduga		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	-	√
5.4	Belanja Transfer		
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	√
5.1.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	√

7.4.2.22.2.1 Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah–LRA.

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

7.4.2.22.2.2 Pengukuran

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Apabila dilakukan pengeluaran belanja berupa pemeliharaan/renovasi/rehab atas aset tetap bukan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan maka pengeluaran belanja tersebut diklasifikasikan sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi/rehab. Misalnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/ renovasi gedung kantor milik

pemerintah pusat yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis gedung kantor bersangkutan, maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi menjadi aset tetap-renovasi/rehab. Aset tetap-renovasi/rehab diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya.

Apabila pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/renovasi pada aset tetap bukan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis aset tetap yang bersangkutan maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja operasi/belanja pemeliharaan.

7.4.2.22.2.3 Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja, antara lain:

Rincian belanja per SKPD;

a. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Jika terdapat realisasi anggaran belanja modal yang tidak memenuhi kriteria belanja modal, maka diungkapkan dalam CALK.

Jika terdapat realisasi anggaran belanja barang dan jasa yang asetnya memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap dicatat sebagai aset tetap, diungkapkan dalam CALK.

7.4.2.23. Pembiayaan

Pembiayaan diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Tabel 7.4.23 Penerimaan Pembiayaan

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPD	SKPKD
6.1	-	Penerimaan Pembiayaan	-	√
6.1.01	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	√
6.1.02	-	Pencairan Dana Cadangan	-	√
6.1.03	-	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	√
6.1.04	-	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	√
6.1.05	-	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	√
6.1.06	-	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	√

b. Pengeluaran Pembiayaan

Tabel 7.4.24 Pengeluaran Pembiayaan

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPD	SKPKD
6.2	-	Pengeluaran Pembiayaan	-	√
6.2.01	-	Pembentukan Dana Cadangan	-	√
6.2.02	-	Penyertaan Modal Daerah	-	√
6.2.03	-	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	√
6.2.04	-	Pemberian Pinjaman Daerah	-	√
6.2.05	-	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	√

7.4.2.23.1. Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Entitas akuntansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pembiayaan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

7.4.2.23.2. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

7.4.2.23.3. Penyajian dan Pengungkapan

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai klasifikasi pembiayaan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan pembiayaan adalah:

a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal/investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
c. Informasi lainnya yang diangggap perlu.

7.4.2.24. Pendapatan – LO dan Beban

7.4.2.24.1. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 7.4.25 Klasifikasi Pendapatan - LO

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
7.1	Pendapatan Asli Daerah-LO		
7.1.01	Pajak Daerah-LO	√	-
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	√	-
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	-	√
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	√	-
7.2	Pendapatan Transfer-LO		
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	-	√
7.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO		
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	√	√
7.3.03	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	√	√
7.4	Surplus Non Operasional-LO		
7.4.01	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	√	√
7.4.02	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	√
7.4.03	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	√	√
7.5	Pendapatan Luar Biasa-LO		
7.5.01	Pendapatan Luar Biasa-LO	-	√

7.4.2.24.1.1 Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat :

a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
   1) timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
   2) timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
   1) pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
   2) pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO menyesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu melalui *self assessment* dan *official assessment*.

a. Sistem *self assesment* artinya masyarakat sendirilah yang harus aktif melaksanakan kewajiban pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan, tanpa harus ada inisiatif tindakan lebih dahulu dari otoritas perpajakan.

b. Sistem *Official Assesment* artinya elemen masyarakat baru akan melaksanakan kewajiban pajak setelah ditentukan dan dihitung lebih dahulu oleh pihak otoritas perpajakan.

Untuk dapat mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memetakan jenis-jenis pajak yang ada ke dalam metode pemungutan pajak yang digunakan. Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti pengaturan sebagai berikut:

a. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Rekening Umum Kas Provinsi Kepulauan Riau tanpa terlebih dahulu pemerintah menerbitkan surat ketetapan.
b. Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat pendapatan Pajak Daerah-LO.

Pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan, pengakuan pendapatan LO sebesar yang telah menjadi hak entitas secara proposional.

Pendapatan diakui sebagai Pendapatan-LO sekaligus diakui sebagai Pendapatan-LRA apabila dalam proses transaksi pendapatan tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas.

Entitas akuntansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan Retribusi diakui apabila SKPD telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah surat ketetapan retribusi atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan surat ketetapan retribusi.

Sesuai dengan kaidah pengakuan akun laporan keuangan secara substansial, hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memungut retribusi baru timbul dan diakui jika layanan telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan layanan telah diterima oleh Wajib Retribusi. Telah diberikan/diterima layanan diwujudkan dalam penerbitan dokumen. Pengakuan pendapatan retribusi tidak menganut prinsip pengendalian tetapi menganut prinsip layanan.

Pendapatan hasil kekayaan Provinsi Kepulauan Riau yang dipisahkan-LO bagian laba BUMD diakui apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan-LO atas aset kemitraan diakui saat diterbitkan surat tagihan kepada pihak ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan pendapatan yang berasal dari TP/TGR, didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara SKP2KS dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan pendapatan baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh SKPD yang berwenang.

Pendapatan bagi hasil dari deposito diakui berdasarkan laporan dari bank dan dilakukan penyesuaian atas pendapatan deposito yang belum diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu pada saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan laporan dari bank tempat deposito.

Pendapatan hasil dari pemanfaatan kekayaan Provinsi Kepulauan Riau diakui saat diterbitkan surat tagihan kepada pihak ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun.

Pendapatan Hasil Penjualan Aset Yang Tidak dipisahkan diakui ketika terbitnya surat ketetapan berita hasil lelang.

Pendapatan dari Hasil Eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Pendapatan transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan dokumen resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Namun demikian penetapan tersebut belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan yang diatur untuk penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui sebesar jumlah alokasi DAU menurut peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Transfer lainnya diakui sebesar hak tagih bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi.

Pendapatan transfer antar daerah diakui atau dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan nilai definitif menurut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selaku penerima.

Pendapatan hibah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut dan terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu. Naskah perjanjian hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

Hibah barang berupa aset tetap dicatat sebagai aset tetap dan pendapatan hibah-LO.

Pendapatan Non Operasional (Surplus Non Operasional-LO) diakui ketika dokumen sumber berupa berita acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar).

Surplus Penjualan Aset Non lancar yang berasal dari aktivitas pelepasan investasi, terjadi apabila harga jual dalam pelepasan investasi lebih tinggi daripada nilai buku investasi tersebut.

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang timbul apabila harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat (*carrying value*) dari kewajiban tersebut. Berdasarkan salinan SP2D LS PPKD, fungsi akuntansi PPKD akan menghapus kewajiban yang telah dibayar dan mengakui adanya surplus dari penyelesaian kewajiban tersebut.

Pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak sering atau tidak rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dicatat sebagai pendapatan luar biasa LO.

7.4.2.24.1.2 Pengukuran

Pendapatan-LO secara umum dicatat sebesar:

a. Nilai nominal pada bukti penerimaan atau surat ketetapan pajak/surat ketetapan retribusi atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.
b. sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud.

Pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan transfer dari Dana Bagi Hasil (DBH), dicatat berdasarkan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

Surplus Non Operasional LO dihitung dari selisih lebih harga jual aset nonlancar dikurangi nilai buku aset non lancar tersebut.

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dihitung dari selisih lebih nilai tercatat (*carrying amount*) suatu kewajiban dikurangi harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) dari kewajiban tersebut.

7.4.2.24.1.3 Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis Pendapatan-LO sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau;
d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.2.24.2. Beban

Beban diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 7.4.26 Klasifikasi Beban

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
8.1	Beban Operasi		
8.1.01	Beban Pegawai	√	-
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	√	-
8.1.03	Beban Bunga	-	√
8.1.04	Beban Subsidi	-	√

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
8.1.05	Beban Hibah	√	√
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	√	√
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	√	√
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortasi	√	
8.2	Beban Transfer		
8.2.01	Beban Bagi Hasil	-	√
8.2.02	Beban Bantuan Keuangan	-	√
8.3	Defisit Non Operasional-LO		
8.3.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	√	√
8.3.02	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	√
8.3.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	√	√
8.4	Beban Luar Biasa		
8.4.01	Beban Tidak Terduga	-	√

7.4.2.24.2.1 Pengakuan

Beban diakui pada saat:

a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Provinsi Kepulauan Riau. Contoh tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar;
b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

a. Metode pendekatan Beban
   Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi sesegera mungkin;
b. Metode pendekatan Aset
   Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga;

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan laporan operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya.

Dalam hal Badan Layanan Umum Provinsi Kepulauan Riau, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

7.4.2.24.2.2 Pengukuran

Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.

Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada pegawai dimaksud.

Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya.

Beban Barang dan Jasa dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah dispute atau (perselisihan) dikemudian hari.

Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan.

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang dan jasa dicatat sebesar nilai buku.

Pengukuran Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap/aset lainnya.

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

Beban transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Beban Penyusutan dan Amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban secara sistematis setiap tahun dengan metode penyusutan garis lurus.

Defisit non operasional antara lain meliputi beban penjualan asset non lancar dan beban penyelesaian kewajiban jangka panjang. Beban penjualan aset non lancar diukur berdasarkan selisih antara harga jual dan nilai buku aset non lancar tersebut.

Beban Luar biasa diukur berdasarkan jumlah tagihan/kas yang dikeluarkan dari anggaran belanja tidak terduga.

7.4.2.24.2.3 Koreksi dan Pengembalian

Koreksi beban yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

7.4.2.24.2.4 Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis beban sesuai klasifikasi ekonomi (*line item*).

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban, antara lain:

a. rincian beban per SKPD;

b. penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
c. informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.2.25. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

7.4.2.25.1.1 Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan

Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan.

7.4.2.25.1.2 Pengakuan dan Pengukuran

Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada:
a. apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan; dan
b. apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

7.4.2.25.1.3 Peristiwa Penyesuai setelah tanggal Pelaporan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan.

Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:
a. Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Pemerintah Provinsi Kepulauan menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
b. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi daluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitor yang terjadi setelah tanggal

pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.

c. Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
d. Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
e. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
f. Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

7.4.2.25.1.4 Peristiwa Nonpenyesuai setelah tanggal Pelaporan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan.

Contoh dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan diantaranya:

a. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
b. Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah setelah tanggal pelaporan.

7.4.2.25.1.5 Kesinambungan Entitas

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, kebijakan ini mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam laporan keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan tergantung pada keadaaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke entitas pemerintah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban yang tercatat.

Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu juga mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausal dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek.

7.4.2.25.1.6 Pengungkapan

1. Pengungkapan Tanggal Laporan Keuangan diotorisasi untuk terbit

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.

Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

2. Pemutakhitan Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan

Apabila Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.

Dalam beberapa kasus, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu memutakhirkan pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya.

3. Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:

a. sifat peristiwa; dan
b. estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.

Berikut adalah contoh peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:

a. Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;
b. Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
c. Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
d. Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
e. Komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau timbulnya kewajiban kontijensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
f. Dimulainya proses tuntunan hukum yang signifikan yang terjadi setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan terkait keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan.

7.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan yang telah disusun Pemerintah Provinsi Kepulauan Periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
3) Neraca;
4) Laporan Operasional (LO);
5) Laporan Arus Kas (LAK); dan
6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini:

7.5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

7.5.1.1. Pendapatan – LRA

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp3.712.434.360.163,46 atau sebesar 94,94% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.910.214.946.462,43. Realisasi Pendapatan tersebut meliputi realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana ikhtisar sebagai berikut:

Tabel 7.5.1 Pendapatan LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PENDAPATAN DAERAH	**3.910.214.946.462,43**	**3.712.434.360.163,46**	**94,94**	**3.958.295.361.262,68**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**1.904.763.732.160,43**	**1.736.336.133.204,89**	**91,16**	**1.980.461.763.464,68**
Pajak Daerah	1.617.238.624.316,00	1.447.285.058.158,50	89,49	1.777.704.385.140,00
Retribusi Daerah	168.940.551.756,24	171.517.367.082,00	101,53	148.286.242.017,30
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.100.000.000,00	2.275.536.541,00	73,40	1.904.909.335,00
Lain-lain PAD yang Sah	115.484.556.088,19	115.258.171.423,39	99,80	52.566.226.972,38
PENDAPATAN TRANSFER	**2.004.127.111.802,00**	**1.974.299.383.024,00**	**98,51**	**1.976.533.066.207,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.004.127.111.802,00	1.974.299.383.024,00	98,51	1.976.533.066.207,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**1.324.102.500,00**	**1.798.843.934,57**	**135,85**	**1.300.531.591,00**
Pendapatan Hibah	1.324.102.500,00	1.798.843.934,57	135,85	1.300.531.591,00

7.5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.904.763.732.160,43	**1.736.336.133.204,89**

Sumber Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.736.336.133.204,89 atau sebesar 91,16% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.904.763.732.160,43. Tabel berikut ini adalah rincian Pendapatan Asli Daerah:

Tabel 7.5.2 Pendapatan Asli Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**1.904.763.732.160,43**	**1.736.336.133.204,89**	**91,16**	**1.980.461.763.464,68**
Pajak Daerah	1.617.238.624.316,00	1.447.285.058.158,50	89,49	1.777.704.385.140,00
Retribusi Daerah	168.940.551.756,24	171.517.367.082,00	101,53	148.286.242.017,30
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.100.000.000,00	2.275.536.541,00	73,40	1.904.909.335,00
Lain-lain PAD yang Sah	115.484.556.088,19	115.258.171.423,39	99,80	52.566.226.972,38

7.5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.617.238.624.316,00	**1.447.285.058.158,50**

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan pengelolaan Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

Tabel berikut ini adalah rincian Pajak Daerah:

Tabel 7.5.3 Pajak Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pajak Daerah	**1.617.238.624.316,00**	**1.447.285.058.158,50**	**89,49**	**1.777.704.385.140,00**
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	444.109.779.594,00	405.307.682.591,00	91,26	596.081.883.938,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	399.572.412.018,00	273.480.737.600,00	68,44	522.716.638.500,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	478.452.376.124,00	489.750.163.677,00	102,36	490.605.194.542,00
Pajak Air Permukaan	33.933.643.819,00	33.017.182.076,00	97,30	1.192.208.723,00
Pajak Rokok	180.651.107.585,00	174.288.290.965,00	96,48	167.108.459.437,00
Pajak Alat Berat	4.334.952.300,00	614.336.352,00	14,17	0,00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	76.184.352.876,00	70.826.664.897,50	92,97	0,00

Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.5.4 Rincian Pajak Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pajak Daerah	**1.617.238.624.316,00**	**1.447.285.058.158,50**	**89,49**	**1.777.704.385.140,00**
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	**444.109.779.594,00**	**405.307.682.591,00**	**91,26**	**596.081.883.938,00**
PKB-Mobil Penumpang-Sedan	13.628.420.459,00	9.139.165.550,00	67,06	14.600.867.857,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep	60.098.158.236,00	54.929.599.391,00	91,40	83.223.828.443,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	255.241.949.229,00	224.538.883.977,00	87,97	331.714.934.959,00
PKB-Mobil Bus-Microbus	295.571.190,00	262.625.008,00	88,85	418.264.750,00
PKB-Mobil Bus-Bus	2.191.996.115,00	2.842.714.059,00	129,69	3.286.105.834,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	12.802.045.999,00	12.908.463.294,00	100,83	18.472.453.052,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	9.992.265.696,00	9.160.009.032,00	91,67	14.290.426.591,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	11.909.285.005,00	11.572.695.951,00	97,17	17.226.016.705,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	865.146.629,00	884.247.652,00	102,21	1.237.085.451,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	76.989.415.721,00	78.977.952.537,00	102,58	111.475.255.121,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	95.525.315,00	91.326.140,00	95,60	136.645.175,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	**399.572.412.018,00**	**273.480.737.600,00**	**68,44**	**522.716.638.500,00**
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	4.011.372.531,00	3.971.040.400,00	98,99	5.386.600.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	49.163.641.161,00	30.316.626.800,00	61,66	64.727.747.500,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	216.024.538.321,00	137.745.131.100,00	63,76	283.363.435.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	261.210.867,00	122.397.700,00	46,86	378.975.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus	1.788.168.053,00	4.276.193.700,00	239,14	2.602.425.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	8.983.236.208,00	8.080.919.200,00	89,96	11.545.050.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	3.366.461.912,00	2.487.726.400,00	73,90	4.335.870.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	5.597.758.761,00	7.591.358.000,00	135,61	7.391.990.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	359.563.296,00	610.246.200,00	169,72	505.800.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	109.737.561.110,00	78.084.468.000,00	71,16	142.115.939.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	278.899.798,00	194.630.100,00	69,78	362.807.000,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	**478.452.376.124,00**	**489.750.163.677,00**	**102,36**	**490.605.194.542,00**
PBBKB-Bahan Bakar Bensin	240.882.197.402,00	282.523.757.628,00	117,29	255.059.527.531,00
PBBKB-Bahan Bakar Solar	237.570.178.722,00	207.226.406.049,00	87,23	235.545.667.011,00
Pajak Air Permukaan	**33.933.643.819,00**	**33.017.182.076,00**	**97,30**	**1.192.208.723,00**
Pajak Air Permukaan	33.933.643.819,00	33.017.182.076,00	97,30	1.192.208.723,00
Pajak Rokok	**180.651.107.585,00**	**174.288.290.965,00**	**96,48**	**167.108.459.437,00**
Pajak Rokok	180.651.107.585,00	174.288.290.965,00	96,48	167.108.459.437,00
Pajak Alat Berat	**4.334.952.300,00**	**614.336.352,00**	**14,17**	**0,00**
Pajak Alat Berat	4.334.952.300,00	614.336.352,00	14,17	0,00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	**76.184.352.876,00**	**70.826.664.897,50**	**92,97**	**0,00**
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	76.184.352.876,00	70.826.664.897,50	92,97	0,00

Tabel 7.5.5 Rincian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	**444.109.779.594,00**	**405.307.682.591,00**	**91,26**	**596.081.883.938,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PKB-Mobil Penumpang-Sedan	**13.628.420.459,00**	**9.139.165.550,00**	**67,06**	**14.600.867.857,00**
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	13.437.883.339,00	8.990.055.846,00	66,90	14.312.861.463,00
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	82.625.024,00	50.305.594,00	60,88	119.311.461,00
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	27.179.835,00	24.523.392,00	90,23	50.812.925,00
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	80.732.261,00	74.280.718,00	92,01	117.882.008,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep	**60.098.158.236,00**	**54.929.599.391,00**	**91,40**	**83.223.828.443,00**
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	59.844.173.820,00	54.698.375.997,00	91,40	82.841.464.510,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	92.782.458,00	72.701.028,00	78,36	141.134.300,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	161.201.958,00	158.522.366,00	98,34	241.229.633,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	**255.241.949.229,00**	**224.538.883.977,00**	**87,97**	**331.714.934.959,00**
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	254.210.987.612,00	223.355.743.744,00	87,86	330.170.949.178,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	135.811.561,00	116.059.559,00	85,46	194.320.419,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	317.808.557,00	321.503.217,00	101,16	467.427.600,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	577.341.499,00	745.577.457,00	129,14	882.237.762,00
PKB-Mobil Bus-Microbus	**295.571.190,00**	**262.625.008,00**	**88,85**	**418.264.750,00**
PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	148.351.442,00	138.792.073,00	93,56	205.321.325,00
PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	128.997.805,00	106.653.823,00	82,68	177.792.925,00
PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	2.299.486,00	3.976.206,00	172,92	3.976.500,00
PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	15.922.457,00	13.202.906,00	82,92	31.174.000,00
PKB-Mobil Bus-Bus	**2.191.996.115,00**	**2.842.714.059,00**	**129,69**	**3.286.105.834,00**
PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	1.956.433.552,00	2.655.323.642,00	135,72	2.946.660.101,00
PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	105.838.670,00	83.035.601,00	78,45	156.236.525,00
PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	43.779.334,00	36.893.991,00	84,27	64.110.900,00
PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	85.944.559,00	67.460.825,00	78,49	119.098.308,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	**12.802.045.999,00**	**12.908.463.294,00**	**100,83**	**18.472.453.052,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	12.456.651.903,00	12.569.799.541,00	100,91	17.951.831.556,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	45.600.043,00	28.605.679,00	62,73	65.533.725,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat	107.993.098,00	106.942.188,00	99,03	164.662.917,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	191.800.955,00	203.115.886,00	105,90	290.424.854,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	**9.992.265.696,00**	**9.160.009.032,00**	**91,67**	**14.290.426.591,00**
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	9.465.204.509,00	8.850.228.720,00	93,50	13.505.715.891,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	443.162.338,00	262.394.035,00	59,21	669.550.200,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	42.869.489,00	22.650.608,00	52,84	57.096.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	41.029.360,00	24.735.669,00	60,29	58.064.500,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	**11.909.285.005,00**	**11.572.695.951,00**	**97,17**	**17.226.016.705,00**
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	9.169.543.426,00	9.278.893.427,00	101,19	13.309.594.755,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	2.595.174.012,00	2.162.389.321,00	83,32	3.710.846.450,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	56.618.967,00	46.421.298,00	81,99	81.607.500,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	87.948.600,00	84.991.905,00	96,64	123.968.000,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	**865.146.629,00**	**884.247.652,00**	**102,21**	**1.237.085.451,00**
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	849.295.428,00	873.612.240,00	102,86	1.214.230.659,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	823.526,00	0,00	0,00	1.067.600,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat	9.475.507,00	3.195.734,00	33,73	14.589.492,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	5.552.168,00	7.439.678,00	134,00	7.197.700,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	**76.989.415.721,00**	**78.977.952.537,00**	**102,58**	**111.475.255.121,00**
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	76.823.119.621,00	78.818.323.271,00	102,60	111.232.415.762,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	47.875.951,00	49.285.900,00	102,95	69.785.259,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	118.420.149,00	110.343.366,00	93,18	173.054.100,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	**95.525.315,00**	**91.326.140,00**	**95,60**	**136.645.175,00**
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	83.430.295,00	80.653.072,00	96,67	118.170.475,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	2.669.132,00	2.172.594,00	81,40	4.773.200,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	9.425.888,00	8.500.474,00	90,18	13.701.500,00

Pada tahun 2025 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi sebesar Rp405.307.682.591,00 atau sebesar 91,26% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp444.109.779.594,00, secara umum tidak tercapainya realisasi atas target yang ditetapkan dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Pusat melalui Undang-undang HKPD yang mewajibkan pemerintah daerah memberikan insentif pembayaran Wajib Pajak setara dengan beban pajak tahun sebelumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam implementasinya Undang-Undang HKPD tersebut menerapkan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 13,94%, yang menyebabkan penurunan realisasi dibandingkan target awal.

Realisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp190.774.201.347,00 atau sebesar 32,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp596.081.883.938,00 dikarenakan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Undang-Undang HKPD) terkait ketentuan Opsen Pajak Daerah yang berlaku mulai 5 Januari 2025. Sebelumnya, pada tahun 2024 Penerimaan PKB dicatat 100% sebagai pendapatan Pajak Daerah yang dicatat di kas daerah Provinsi terlebih dahulu, kemudian disalurkan ke Kabupaten/Kota melalui mekanisme Bagi Hasil. Sedangkan pada tahun 2025 tarif dasar PKB untuk provinsi diturunkan, dan porsi untuk Kabupaten/Kota ditarik langsung sebagai Opsen yang langsung masuk ke kas Kabupaten/Kota. Sehingga secara nominal, nilai realisasi yang tercatat di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi mengalami penurunan dikarenakan porsi Kabupaten/Kota tidak lagi dicatat terlebih dahulu di kas daerah provinsi.

Tabel 7.5.6 Rincian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	**399.572.412.018,00**	**273.480.737.600,00**	**68,44**	**522.716.638.500,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	**4.011.372.531,00**	**3.971.040.400,00**	**98,99**	**5.386.600.000,00**
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	4.011.372.531,00	3.971.040.400,00	98,99	5.386.600.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	**49.163.641.161,00**	**30.316.626.800,00**	**61,66**	**64.727.747.500,00**
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	49.163.641.161,00	30.316.626.800,00	61,66	64.727.747.500,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	**216.024.538.321,00**	**137.745.131.100,00**	**63,76**	**283.363.435.000,00**
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	216.024.538.321,00	137.745.131.100,00	63,76	283.363.435.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	**261.210.867,00**	**122.397.700,00**	**46,86**	**378.975.000,00**
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	261.210.867,00	122.397.700,00	46,86	378.975.000,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus	**1.788.168.053,00**	**4.276.193.700,00**	**239,14**	**2.602.425.000,00**
BBNKB-Mobil Bus-Bus	1.788.168.053,00	4.276.193.700,00	239,14	2.602.425.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	**8.983.236.208,00**	**8.080.919.200,00**	**89,96**	**11.545.050.000,00**
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	8.983.236.208,00	8.080.919.200,00	89,96	11.545.050.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	**3.366.461.912,00**	**2.487.726.400,00**	**73,90**	**4.335.870.000,00**
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	3.366.461.912,00	2.487.726.400,00	73,90	4.335.870.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	**5.597.758.761,00**	**7.591.358.000,00**	**135,61**	**7.391.990.000,00**
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	5.597.758.761,00	7.591.358.000,00	135,61	7.391.990.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	**359.563.296,00**	**610.246.200,00**	**169,72**	**505.800.000,00**
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	359.563.296,00	610.246.200,00	169,72	505.800.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	**109.737.561.110,00**	**78.084.468.000,00**	**71,16**	**142.115.939.000,00**
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	109.737.561.110,00	78.084.468.000,00	71,16	142.115.939.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	**278.899.798,00**	**194.630.100,00**	**69,78**	**362.807.000,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	278.899.798,00	194.630.100,00	69,78	362.807.000,00

Pada tahun 2025 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi sebesar Rp273.480.737.600,00 atau sebesar 68,44% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp399.572.412.018,00, secara umum tidak tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang HKPD yang mewajibkan pemerintah daerah memberikan insentif pembayaran Wajib Pajak setara dengan beban pajak tahun sebelumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam implementasinya Undang-Undang HKPD tersebut menerapkan insentif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 39,74%, yang menyebabkan penurunan realisasi dibandingkan target awal. Selain itu, rendahnya capaian BBNKB dipengaruhi kondisi perekonomian yang belum stabil yang menyebabkan penurunan penjualan kendaraan baru dan rendahnya daya beli masyarakat. Disamping itu juga memberikan insentif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik (EV) dalam rangka merangsang pasar baru.

Realisasi pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp249.235.900.900,00 atau sebesar 47,68% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp522.716.638.500,00 dikarenakan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Undang-Undang HKPD) terkait ketentuan Opsen Pajak Daerah yang berlaku mulai 5 Januari 2025. Sebelumnya, pada tahun 2024 Penerimaan BBNKB dicatat 100% sebagai pendapatan Pajak Daerah yang dicatat di kas daerah Provinsi terlebih dahulu, kemudian disalurkan ke Kabupaten/Kota melalui mekanisme Bagi Hasil. Sedangkan pada tahun 2025 tarif dasar BBNKB untuk provinsi diturunkan, dan porsi untuk Kabupaten/Kota ditarik langsung sebagai Opsen yang langsung masuk ke kas Kabupaten/Kota. Sehingga secara nominal, nilai realisasi yang tercatat di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi mengalami penurunan dikarenakan porsi Kabupaten/Kota tidak lagi dicatat terlebih dahulu di kas daerah provinsi.

Tabel 7.5.7 Rincian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	**478.452.376.124,00**	**489.750.163.677,00**	**102,36**	**490.605.194.542,00**
PBBKB-Bahan Bakar Bensin	240.882.197.402,00	282.523.757.628,00	117,29	255.059.527.531,00
PBBKB-Bahan Bakar Solar	237.570.178.722,00	207.226.406.049,00	87,23	235.545.667.011,00

Pada tahun 2025 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terealisasi sebesar Rp489.750.163.677,00 atau sebesar 102,36% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp478.452.376.124,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp855.030.865,00 atau sebesar 0,17% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp490.605.194.542,00. Penurunan ini dipengaruhi oleh dinamika penerimaan PBBKB yang sangat sensitif terhadap fluktuasi konsumsi BBM, serta adanya normalisasi konsumsi bahan bakar industri di Kawasan Perdagangan Bebas (Batam, Bintan, Karimun). Di samping itu, transisi ke penggunaan energi alternatif dan kendaraan listrik secara bertahap juga mulai menekan volume konsumsi BBM di masyarakat.

Tabel 7.5.8 Rincian Pajak Air Permukaan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pajak Air Permukaan	**33.933.643.819,00**	**33.017.182.076,00**	**97,30**	**1.192.208.723,00**
Pajak Air Permukaan	33.933.643.819,00	33.017.182.076,00	97,30	1.192.208.723,00

Pada tahun 2025 Pajak Air Permukaan terealisasi sebesar Rp33.017.182.076,00 atau sebesar 97,30% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp33.933.643.819,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp31.824.973.353,00 atau sebesar 2669,41% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.192.208.723,00. Lonjakan kenaikan yang sangat tinggi ini dipengaruhi oleh pembayaran piutang Pajak Air Permukaan oleh PT Adhya Tirta Batam kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 525K/TUN/2022 serta putusan Peninjauan Kembali (PK) terkait yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Selain itu, kenaikan ini juga didorong oleh hasil positif dari upaya intensifikasi pajak dan pemutakhiran data volume pengambilan air melalui Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPA) di kawasan industri Batam, Bintan, dan Karimun.

Tabel 7.5.9 Rincian Pajak Rokok – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pajak Rokok	**180.651.107.585,00**	**174.288.290.965,00**	**96,48**	**167.108.459.437,00**
Pajak Rokok	180.651.107.585,00	174.288.290.965,00	96,48	167.108.459.437,00

Pada tahun 2025 Pajak Rokok terealisasi sebesar Rp174.288.290.965,00 atau sebesar 96,48% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp180.651.107.585,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp7.179.831.528,00 atau sebesar 4,30% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp167.108.459.437,00. Kenaikan ini dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) oleh Pemerintah Pusat yang berdampak proporsional terhadap peningkatan alokasi dana bagi hasil Pajak Rokok yang diterima Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai pembanding fiskal,

pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperoleh proporsi alokasi sebesar 0,007704 dengan estimasi nilai sebesar Rp175.729.790.267,00 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-58/PK/2023.

Tabel 7.5.10 Rincian Pajak Alat Berat – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pajak Alat Berat	**4.334.952.300,00**	**614.336.352,00**	**14,17**	**0,00**
Pajak Alat Berat	4.334.952.300,00	614.336.352,00	14,17	0,00

Pada tahun 2025 Pajak Alat Berat (PAB) terealisasi sebesar Rp614.336.352,00 atau sebesar 14,17% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp4.334.952.300,00. Rendahnya capaian realisasi tersebut disebabkan oleh adanya jeda waktu administratif, dimana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus terlebih dahulu menerbitkan regulasi turunan mengenai tata cara pemungutan PAB sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1289/KPTS-28/VII/2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Pajak Alat Berat di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga pemungutan baru dapat diimplementasikan secara efektif sejak bulan September 2025. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang tidak mencatatkan realisasi, penerimaan tahun ini mengalami pertumbuhan positif mengingat PAB merupakan jenis sumber penerimaan baru yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, setelah pada tahun sebelumnya belum dapat dipungut akibat keterbatasan regulasi Nilai Jual Alat Berat (NJAB) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024.

Tabel 7.5.11 Rincian Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)– LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	**76.184.352.876,00**	**70.826.664.897,50**	**92,97**	**0,00**
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	76.184.352.876,00	70.826.664.897,50	92,97	0,00

Pada tahun 2025 Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terealisasi sebesar Rp70.826.664.897,50 atau sebesar 92,97% dari target yang ditetapkan

dalam APBD sebesar Rp76.184.352.876,00. Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum dapat menetapkan target maupun mencatatkan realisasi penerimaan. Hal tersebut dikarenakan Opsen MBLB merupakan jenis sumber penerimaan baru yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, yang diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin sekaligus mengoptimalkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di daerah.

7.5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	168.940.551.756,24	**171.517.367.082,00**

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pemungutan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan juga Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Daerah.

Pada tahun 2025 Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp171.517.367.082,00 atau sebesar 101,53% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp168.940.551.756,24.

Adapun rincian Retribusi Daerah terdiri dari:

Tabel 7.5.12 Retribusi Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Retribusi Daerah	**168.940.551.756,24**	**171.517.367.082,00**	**101,53**	**148.286.242.017,30**
Retribusi Jasa Umum	162.484.348.266,00	164.145.264.443,00	101,02	137.516.081.176,30
Retribusi Jasa Usaha	5.171.572.325,24	5.950.969.639,00	115,07	5.742.143.841,00
Retribusi Perizinan Tertentu	1.284.631.165,00	1.421.133.000,00	110,63	5.028.017.000,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.13 Rincian Retribusi Jasa Umum – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Retribusi Jasa Umum	**162.484.348.266,00**	**164.145.264.443,00**	**101,02**	**137.516.081.176,30**
Retribusi Pelayanan Kesehatan	**162.484.348.266,00**	**164.145.264.443,00**	**101,02**	**137.516.081.176,30**
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	162.484.348.266,00	164.145.264.443,00	101,02	137.516.081.176,30

Pendapatan Retribusi Jasa Umum tahun 2025 terealisasi sebesar Rp164.145.264.443,00 atau sebesar 101,02% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp162.484.348.266,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp26.629.183.266,70 atau sebesar 19,36% selaras dengan meningkatnya target Retribusi Pelayanan Kesehatan dibandingkan tahun 2024. Kenaikan ini bersumber dari optimalisasi layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib yang didorong oleh peningkatan volume kunjungan pasien dan keberhasilan pengembangan berbagai layanan kesehatan. Inovasi tersebut meliputi penyediaan Layanan "*One Day Care*" untuk Anak Penderita Kanker dan Kelainan Darah, optimalisasi poli spesialis jantung dan saraf hingga implementasi tindakan intervensi jantung perdana di Provinsi Kepulauan Riau pada Oktober 2025 menggunakan teknologi *Rotational Atherectomy* atau *Rotablator* yang secara signifikan mampu menekan angka rujukan pasien ke luar daerah.

Tabel 7.5.14 Rincian Retribusi Jasa Usaha– LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Retribusi Jasa Usaha	**5.171.572.325,24**	**5.950.969.639,00**	**115,07**	**5.742.143.841,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**1.819.463.600,00**	**2.145.830.800,00**	**117,94**	**1.927.137.000,00**
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	1.519.463.600,00	1.545.830.800,00	101,74	1.609.917.000,00
Retribusi Pemakaian Alat	300.000.000,00	475.000.000,00	158,33	317.220.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	**125.775.000,00**	**13.300.000,00**	**10,57**	**8.250.000,00**
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	125.775.000,00	13.300.000,00	10,57	8.250.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	**700.000.000,00**	**617.849.585,00**	**88,26**	**2.510.628.596,00**
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	700.000.000,00	617.849.585,00	88,26	2.510.628.596,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	**136.000.000,00**	**141.614.550,00**	**104,13**	**160.520.545,00**
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	0,00	0,00	0,00	88.735.700,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	136.000.000,00	141.614.550,00	104,13	71.784.845,00
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	**1.883.983.725,24**	**2.237.394.264,00**	**118,76**	**0,00**
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	1.883.983.725,24	2.237.394.264,00	118,76	0,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	**506.350.000,00**	**794.980.440,00**	**157,00**	**1.135.607.700,00**
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	506.350.000,00	794.980.440,00	157,00	1.135.607.700,00

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha tahun 2025 terealisasi sebesar Rp5.950.969.639,00 atau sebesar 115,07% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp5.171.572.325,24. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp208.825.798,00 atau sebesar 3,64% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp5.742.143.841,00 dipengaruhi oleh optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perluasan kerja sama pemanfaatan ruang perairan dengan pihak swasta, serta tingginya volume permintaan layanan teknis pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berikut dibawah ini penjelasan capaian realisasi Retribusi Jasa Usaha:

1. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.145.830.800,00 atau sebesar 117,94% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.819.463.600,00. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

    a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Badan Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp125.000.000,00 dari yang sebelumnya tidak dianggarkan merupakan sewa barang milik daerah berupa sebagian tanah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang digunakan untuk penempatan Tower Telekomunikasi berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan PT. Tower Bersama Nomor B/000.2.3.2/768.2/BKAD-SET/2025 dan Nomor 3737TBIG-TBE-11/PMS/04/VIII/2025 tentang Sewa Menyewa Barang Milik Daerah berupa Sebagian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang digunakan untuk Penempatan Tower Telekomunikasi kepada PT. Tower Bersama Tanggal 12 Agustus 2025.

b. Retribusi Pemakaian Ruangan pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib terealisasi sebesar Rp187.170.800,00 atau sebesar 102,90% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp181.903.600,00. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan diperoleh dari kontribusi utama antara lain sewa ruangan atm, sewa kantor kas, sewa ruang rapat dan auditorium serta sewa kantin.
c. Sementara itu, Retribusi Pemakaian Ruangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah terealisasi sebesar Rp1.305.680.000,00 atau sebesar 101,64% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.284.580.000,00. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan diperoleh dari kontribusi utama antara lain sewa ruangan atm dan meningkatnya frekuensi sewa aula di asrama haji.
d. Retribusi Pemakaian Alat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terealisasi sebesar Rp475.000.000,00 atau sebesar 158,33% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp300.000.000,00. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan diperoleh dari kontribusi utama yaitu penyewaan peralatan *Atomic Absorption Spectrofotometri* (AAS).

2. Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib terealisasi sebesar Rp9.150.000,00 atau sebesar 158,44% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp5.775.000,00. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan disebabkan karena meningkatnya sewa kamar di rumah singgah untuk keluarga pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib. Sementara itu pada BLUD SMK Dinas Pendidikan terealisasi sebesar Rp4.150.000,00 atau sebesar 3,46% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp120.000.000,00. Tidak tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan dikarenakan tidak dapat dioperasionalkannya secara maksimal beberapa kamar Edotel (*Educational Hotel*) yang dikelola oleh SMKN 2 Batam dan SMKN 2 Tanjungpinang.

3. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tahun 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan terealisasi sebesar Rp617.849.585,00 atau sebesar 88,26% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp700.000.000,00. Tidak tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan disebabkan antara lain:

   a. Faktor alam akibat kondisi cuaca ekstrem di perairan Kepulauan Anambas dan Natuna menjadi tantangan utama bagi aktivitas penangkapan ikan. Berdasarkan data dari Kantor Stasiun Meteorologi Maritim Natuna, dinamika cuaca yang sangat berubah-ubah menyulitkan operasional nelayan diantaranya:
      1) Tantangan musim selatan dan barat daya (Juli - November) ditandai dengan gelombang laut tinggi yang membatasi aktivitas penangkapan ikan secara signifikan.
      2) Tantangan musim utara (Desember - Februari), cuaca ekstrem dengan angin kencang dan gelombang tinggi menghambat operasional nelayan secara keseluruhan.
      3) Perubahan pola cuaca yang merupakan ketidakpastian cuaca yang berubah-ubah setiap bulan mengakibatkan nelayan kesulitan mengoptimalkan jadwal dan logistik penangkapan ikan.

b. Faktor persaingan usaha dan sebagian besar pelaku usaha dan masyarakat telah memiliki *Freezer* dan membangun *Air Blast Freezer* (ABF) serta *Cold Storage* sendiri untuk penyimpanan ikan.
c. Menurunnya aktivitas Kapal *Purse Seine* di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengakibatkan penurunan signifikan pada pendapatan dari jasa tambat labuh, penjualan air, dan layanan bengkel karena kapal-kapal *Purse Seine* yang biasanya menjadi pelanggan.

4. Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan terealisasi sebesar Rp141.614.550,00 atau sebesar 104,13% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp136.000.000,00. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan didukung oleh beberapa faktor diantaranya:
   a. Keberhasilan dalam perawatan bibit ikan yang optimal, sehingga angka kematian ikan rendah.
   b. Ketersediaan pakan dan vitamin ikan yang memadai, yang meningkatkan kualitas dan volume produksi.
   c. Volume ikan siap jual melebihi estimasi awal akibat masa pembesaran yang lebih singkat, memungkinkan siklus panen dilakukan lebih awal dan lebih sering.
   d. Diversifikasi jenis benih, tidak hanya terbatas pada pemeliharaan ikan kakap, yang dapat memperluas pasar dan peningkatan volume penjualan.
5. Pendapatan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan tahun 2025 pada Dinas Perhubungan terealisasi sebesar Rp2.237.394.264,00 atau sebesar 118,76% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.883.983.725,24. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan diantaranya diperoleh dari upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Perhubungan dalam mengembangkan/memperluas sumber pendapatan retribusi dengan menawarkan penggunaan wilayah perairan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada pihak swasta untuk menunjang bisnisnya.
6. Pendapatan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp794.980.440,00 atau 157,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp506.350.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan terealisasi sebesar Rp245.715.440,00 atau sebesar 187,07% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp131.350.000,00. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan dikarenakan antara lain:
      1) Tingginya permintaan pemeriksaan benih kelapa sawit dari PT. Bakti Tani Nusantara di Pulau Batam dan meningkatnya pembelian bibit tanaman buah oleh masyarakat pada UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
      2) Meningkatnya pemeriksaan kesehatan hewan ternak pada pelaku usaha peternakan seperti pemeriksaan kesehatan hewan komoditi ekspor ayam pada

PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA) dan pemeriksaan sampel ternak babi pada PT. Indotirta Suaka di Pulau Bulan, Batam yang dilaksanakan oleh UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan.

b. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan terealisasi sebesar Rp530.669.000,00 atau sebesar 141,51% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp375.000.000,00. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan diperoleh dari meningkatnya permintaan uji mutu bahan konstruksi dari penyedia pelaksana kontruksi.
c. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan terealisasi sebesar Rp18.596.000,00 dari yang sebelumnya tidak dianggarkan merupakan layanan laboratorium dalam rangka pengujian mutu atas produk hasil perikanan yang dikelola oleh UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMP2KP).

Tabel 7.5.15 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Retribusi Perizinan Tertentu	**1.284.631.165,00**	**1.421.133.000,00**	**110,63**	**5.028.017.000,00**
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.800.000,00**
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	**1.200.000.000,00**	**1.421.133.000,00**	**118,43**	**5.009.217.000,00**
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.200.000.000,00	1.421.133.000,00	118,43	5.009.217.000,00
Retribusi Pertambangan Rakyat	**84.631.165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat	84.631.165,00	0,00	0,00	0,00

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.421.133.000,00 atau sebesar 110,63% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.284.631.165,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp3.606.884.000,00 atau sebesar 71,74% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp5.028.017.000,00 yang dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kebijakan restrukturisasi jenis pungutan pasca-implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Undang-Undang HKPD) yang diturunkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana ketentuan tersebut mencabut kewenangan daerah atas Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan

Pelayanan Angkutan Umum, serta adanya perubahan regulasi administratif pada Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai penopang utama Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu. Salah satu penyebab turunnya realisasi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 terdapat perubahan sistem pengajuan perpanjangan izin TKA oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI yang mengunci pengajuan ke satu wilayah (lokus tunggal) berkaitan erat dengan status wilayah administrasi atau kawasan khusus tempat TKA tersebut bekerja sehingga berdampak terhadap menurunnya Pendapatan Asli Daerah Provinsi. Berikut dibawah ini penjelasan capaian realisasi Retribusi Perizinan Tertentu:

1. Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.421.133.000,00 atau sebesar 118,43% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.200.000.000,00. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan disebabkan meningkatnya perpanjangan izin TKA yang secara regulasi administratif terdaftar dan memiliki ruang lingkup operasional kerja lintas kabupaten/kota dalam satu wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau, sehingga pemungutan retribusinya menjadi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi.
2. Kemudian Retribusi Pertambangan Rakyat pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2025 tidak terealisasi dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp84.631.165,00 dikarenakan belum dapat dilakukan pemungutan Retribusi Pertambangan Rakyat yang disebabkan belum ditetapkannya tarif Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA). Untuk itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menuangkan tarif IPERA ke dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah yang saat ini dalam tahap evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur.

7.5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	3.100.000.000,00	**2.275.536.541,00**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal kepada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. Pada tahun 2025 bagian laba atas penyertaan modal terealisasi sebesar Rp2.275.536.541,00 atau 73,40% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.100.000.000,00 yang berasal dari dividen PT. Bank Riau Kepri Syariah. Tidak tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan dikarenakan kerugian finansial pada 2 (dua) BUMD berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025. Kerugian yang dialami oleh PT. Pelabuhan Kepri sebesar Rp1.864.966.167,00 dan PDAM Tirta Kepri sebesar Rp2.017.095.818,00, sedangkan pada BUMD PT. Pembangunan Kepri mencatat laba kecil sebesar Rp323.079.823,00 sehingga ketiga BUMD tersebut belum dapat memberikan dividen kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2025. Sementara itu PT. Energi Kepri (Perseroda) yang baru berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2024 tentang

Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri. Hingga akhir tahun 2025, BUMD tersebut belum beroperasi secara penuh sehingga belum dapat memberikan dividen.

Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp370.627.206,00 atau sebesar 19,46% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.904.909.335,00 dikarenakan adanya kenaikan komposisi pembagian dividen atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) yang membukukan pertumbuhan laba bersih pada tahun buku berkenaan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024.

Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.16 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**3.100.000.000,00**	**2.275.536.541,00**	**73,40**	**1.904.909.335,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	**3.100.000.000,00**	**2.275.536.541,00**	**73,40**	**1.904.909.335,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	**2.500.000.000,00**	**2.275.536.541,00**	91,02	**1.904.909.335,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.500.000.000,00	2.275.536.541,00	91,02	1.904.909.335,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (dividen) sebesar Rp2.275.536.541,00. Perhitungan pembagian dividen PT. Bank Riau Kepri Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Alokasi Penggunaan Laba Bersih

Tabel 7.5.17 Alokasi Penggunaan Laba Bersih

No	Keterangan	Komposisi (%)	Nominal (Rp)
1	Dividen	67,50%	229.077.280.007,00
2	Cadangan Umum	27,50%	93.327.780.743,00
3	Dana Pembinaan Kemitraan	5%	16.968.687.408,00
Total		**100,00%**	**339.373.748.158,00**

2. Dividen perbulan tahun buku 2024 yang dibayar pada tahun 2025 untuk seluruh pemegang saham sebesar Rp19.089.773.334,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Dividen}}{\text{12 bulan}} = \frac{\text{Rp229.077.280.007,00}}{12} = \textbf{Rp19.089.773.334,00}$$

3. Jumlah modal PT. Bank Riau Kepri Syariah untuk periode bulan Januari s.d Juli 2024 berdasarkan pencatatan OJK sebesar Rp1.207.160.700.000,00.

4. Jumlah modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode bulan Januari s.d Maret 2024 berdasarkan pencatatan OJK Rp12.000.000.000,00 dengan komposisi sebesar 0,99% (pembulatan) melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah modal pemegang saham x 100\%}}{\text{Total modal Bank}} = \frac{\text{Rp12.000.000.000,00}}{\text{Rp 1.207.160.700.000,00}} \times 100\% = \textbf{0,99407\% pembulatan (0,99\%)}$$

Perhitungan dividen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan komposisi saham sebesar 0,99% (pembulatan) untuk periode bulan Januari s.d Juli 2024 sebagai berikut:

Tabel 7.5.18 Perhitungan Dividen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode bulan Januari s.d Juli 2024

No	Bulan	Dividen yang diterima per bulan (Dividen perbulan seluruh pemegang saham x komposisi) = Rp19.089.773.334,00 X 0,99407%
1	Januari	189.765.545,00
2	Februari	189.765.545,00
3	Maret	189.765.545,00

No	Bulan	Dividen yang diterima per bulan (Dividen perbulan seluruh pemegang saham x komposisi) = Rp19.089.773.334,00 X 0,99407%
4	April	189.765.545,00
5	Mei	189.765.545,00
6	Juni	189.765.545,00
7	Juli	189.765.545,00
Total		**1.328.358.815,00**

5. Jumlah modal PT. Bank Riau Kepri Syariah untuk periode bulan Agustus s.d Desember 2024 berdasarkan pencatatan OJK sebesar Rp1.209.260.700.000,00

   Perubahan Modal PT. Bank Riau Kepri Syariah dikarenakan adanya penambahan setoran modal dari pemegang saham lainnya yang diakui atau dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Agustus 2024, dikarenakan adanya penambahan setoran modal dari pemegang saham lain sebesar Rp2.100.000.000,00.

6. Jumlah Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode bulan Agustus s.d Desember 2024 berdasarkan pencatatan OJK Rp12.000.000.000,00 dengan komposisi sebesar 0,99234% (pembulatan 0,99%) dengan perhitungan sebagai berikut:

   $$\frac{\text{Jumlah modal pemegang saham x 100\%}}{\text{Total modal Bank}} = \frac{\text{Rp12.000.000.000,00}}{\text{Rp 1.209.260.700.000,00}} \times 100\% = 0{,}99234\% \text{ (pembulatan 0,99\%)}$$

   Perhitungan Dividen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan komposisi saham sebesar 0,99% (pembulatan) untuk periode Agustus s.d Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 7.5.19 Perhitungan Dividen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode bulan Agustus s.d Desember 2024

No	Bulan	Dividen yang diterima per bulan (Dividen perbulan seluruh pemegang saham x komposisi) = Rp19.089.773.334,00 X 0,99234%
1	Agustus	189.435.546,00
2	September	189.435.545,00
3	Oktober	189.435.545,00
4	November	189.435.545,00
5	Desember	189.435.545,00
	Total	**947.177.726,00**

7. Total dari dividen yang diterima Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun buku 2024 yang dibayarkan pada tahun 2025:

   = Total dividen (Januari s.d Juli 2024) + Total dividen (Agustus.d Desember 2024)

   = Rp1.328.358.815,00 + Rp947.177.725,00= **Rp2.275.536.541,00**

8. Perubahan persentase komposisi modal setiap pemegang saham, dipengaruhi oleh adanya penambahan penyertaan modal dari pemegang saham lain yang diakui/dicatat sebagai tambahan penyertaan modal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

7.5.1.1.1.4 Lain – lain PAD Yang Sah

Lain – lain PAD Yang Sah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	115.484.556.088,19	**115.258.171.423,39**

Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan daerah yang bukan berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba dari BUMD dan Investasi lainnya dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah maupun Kas di Badan Layanan Umum Daerah dalam tahun anggaran yang berjalan.

Pada tahun 2025 Lain-lain PAD yang Sah terealisasi sebesar Rp115.258.171.423,39 atau 99,80% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp115.484.556.088,19. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp62.691.944.451,01 atau sebesar 119,26% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp52.566.226.972,38 dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor utama yaitu pendapatan bunga deposito dalam rangka manajemen kas serta pengembalian sisa penggunaan dana hibah Pilkada serentak tahun 2024 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau.

Rincian Lain – lain PAD Yang Sah dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.20 Lain – lain PAD Yang Sah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Lain-lain PAD yang Sah	**115.484.556.088,19**	**115.258.171.423,39**	**99,80**	**52.566.226.972,38**
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	512.084.414,00	0,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	957.027.354,47	0,00	1.336.203.722,00
Jasa Giro	4.500.000.000,00	3.616.972.805,65	80,38	6.290.193.867,90
Pendapatan Bunga	1.245.873.063,98	1.889.238.643,57	151,64	339.106.060,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	163.611,88	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	80.794.464,06	0,00	2.713.160.286,90
Pendapatan Denda Pajak Daerah	29.741.310.212,21	25.858.479.507,12	86,94	14.570.561.041,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.098.168,00	35.861.416,00	3.265,57	6.501.215,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	904.694.700,00
Pendapatan dari Pengembalian	73.423.349.811,00	76.974.438.969,96	104,84	3.951.467.681,76
Pendapatan BLUD	6.472.476.433,00	5.227.554.179,52	80,77	22.421.878.770,68

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	4.107.657,16	0,00	4.925.402,14
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.448.400,00	100.448.400,00	100,00	26.034.225,00

Rincian Lain-lain PAD yang Sah diuraikan pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 7.5.21 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	**0,00**	**512.084.414,00**	**0,00**	**0,00**
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	**0,00**	**69.710.000,00**	**0,00**	**0,00**
Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	69.710.000,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	**0,00**	**442.374.414,00**	**0,00**	**0,00**
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	0,00	442.374.414,00	0,00	0,00

Tabel 7.5.22 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	**0,00**	**957.027.354,47**	**0,00**	**1.336.203.722,00**
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	**0,00**	**957.027.354,47**	**0,00**	**1.336.203.722,00**
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	957.027.354,47	0,00	1.336.203.722,00

Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD merupakan pendapatan sewa kantin pada satuan pendidikan sebesar Rp847.469.854,27 dan pelunasan piutang Pendapatan Kapal MV. Lintas Kepri pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Kepri tahun 2020 sebesar Rp0,20 serta Pembayaran Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupa tanah dan fasilitas seluas 7.450 m^2 di Kawasan Guridam 12 Kota Tanjungpinang sebesar Rp109.557.500,00.

Tabel 7.5.23 Jasa Giro – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Jasa Giro	**4.500.000.000,00**	**3.616.972.805,65**	**80,38**	**6.290.193.867,90**
Jasa Giro pada Kas Daerah	**4.500.000.000,00**	**2.632.574.009,25**	**58,50**	**4.478.565.314,51**
Jasa Giro pada Kas Daerah	4.500.000.000,00	2.632.574.009,25	58,50	4.478.565.314,51
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	**0,00**	**732.404.374,11**	**0,00**	**1.617.505.366,33**
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	732.404.374,11	0,00	1.617.505.366,33
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.123.187,06**
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	0,00	0,00	194.123.187,06
Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	**0,00**	**251.994.422,29**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	0,00	251.994.422,29	0,00	0,00

Pada Tahun 2024, Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP disajikan pada kode akun rincian objek 4.1.04.05.04 dengan uraian akun rincian objek Jasa Giro pada Rekening Dana BOS berikut sub rincian objeknya. Selanjutnya pada Tahun 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana akun tersebut dimutakhirkan menjadi kode akun objek 4.1.04.05.06 dengan uraian akun rincian objek Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP berikut sub rincian objeknya.

Tabel 7.5.24 Pendapatan Bunga – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan Bunga	**1.245.873.063,98**	**1.889.238.643,57**	**151,64**	**339.106.060,00**
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	**1.245.873.063,98**	**1.889.238.643,57**	**151,64**	**339.106.060,00**
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.245.873.063,98	1.889.238.643,57	151,64	339.106.060,00

Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp1.889.238.643,57 atau 151,64% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.245.873.063,98. Realisasi tersebut merupakan remunerasi dari Bank Indonesia atas Pembentukan Fasilitas TDF Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi hasil oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp40.451.450,00 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2024 dan pendapatan yang bersumber dari Bunga Deposito atas Penempatan Uang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka manajemen kas sebesar Rp1.848.787.193,57 pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp1.018.102.269,57 dan PT. Bank KB Indonesia sebesar Rp830.684.924,00.

Tabel 7.5.25 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00

Tabel 7.5.26 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	**0,00**	**163.611,88**	**0,00**	**0,00**
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	**0,00**	**163.611,88**	**0,00**	**0,00**
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	163.611,88	0,00	0,00

Tabel 7.5.27 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	**0,00**	**80.794.464,06**	**0,00**	**2.713.160.286,90**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	**0,00**	**80.794.464,06**	**0,00**	**2.713.160.286,90**
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	80.794.464,06	0,00	2.713.160.286,90

Tabel 7.5.28 Pendapatan Denda Pajak Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan Denda Pajak Daerah	**29.741.310.212,21**	**25.858.479.507,12**	**86,94**	**14.570.561.041,00**
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	**13.955.066.122,21**	**9.948.896.000,00**	**71,29**	**14.542.181.200,00**
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	293.421.299,00	191.734.700,00	65,34	364.564.700,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	1.477.024.239,00	998.666.700,00	67,61	1.775.942.100,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	7.340.221.407,21	5.031.246.400,00	68,54	7.228.404.700,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	4.187.720.274,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	0,00	2.770.900,00	0,00	7.833.700,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	7.535.147,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	649.143.756,00	38.527.200,00	5,94	55.134.300,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	0,00	348.611.700,00	0,00	504.236.700,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	0,00	134.098.300,00	0,00	258.806.800,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	0,00	241.980.100,00	0,00	236.019.900,00
Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	0,00	23.421.200,00	0,00	38.360.700,00
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	0,00	2.936.643.200,00	0,00	4.070.233.900,00
Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	0,00	1.195.600,00	0,00	2.643.700,00
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	**2.787.600,00**	**2.837.900,00**	**101,80**	**0,00**
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	2.787.600,00	1.506.000,00	54,02	0,00
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	0,00	496.000,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	0,00	484.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	0,00	351.900,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	**0,00**	**91.312.431,00**	**0,00**	**27.713.748,00**
Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Solar	0,00	91.312.431,00	0,00	27.713.748,00
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	**15.783.456.490,00**	**15.782.762.058,12**	**100,00**	**666.093,00**
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	15.783.456.490,00	15.782.762.058,12	100,00	666.093,00
Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	**0,00**	**32.671.118,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	0,00	32.671.118,00	0,00	0,00

Tabel 7.5.29 Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	**1.098.168,00**	**35.861.416,00**	**3265,57**	**6.501.215,00**
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	**0,00**	**341.518,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	**0,00**	**341.518,00**	0,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	**1.098.168,00**	**35.519.898,00**	**3234,47**	**6.501.215,00**
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan	1.098.168,00	35.269.505,00	3211,67	6.291.215,00
Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	0,00	250.393,00	0,00	0,00

Tabel 7.5.30 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**904.694.700,00**
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**904.694.700,00**
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	904.694.700,00

Tabel 7.5.31 Pendapatan dari Pengembalian

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan dari Pengembalian	**73.423.349.811,00**	**76.974.438.969,96**	**104,84**	**3.951.467.681,76**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	**0,00**	**268.279.192,00**	**0,00**	**145.420.254,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	0,00	268.279.192,00	0,00	145.420.254,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	**0,00**	**253.574.420,00**	**0,00**	**257.212.278,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	202.119.438,00	0,00	148.281.798,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	36.879.430,00	0,00	97.866.080,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK	0,00	6.212,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	0,00	12.874.000,00	0,00	9.399.400,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00	1.670.000,00	0,00	1.665.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	0,00	25.340,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.542.168,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	0,00	0,00	0,00	2.542.168,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**646.000,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	646.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	**0,00**	**364.132.357,64**	**0,00**	**395.034.137,88**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Baku	0,00	3.710.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	3.468.500,00	0,00	998.700,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	8.002.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	235.644.700,00	0,00	370.517.937,88
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	47.590.600,00	0,00	15.339.500,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	71.118.557,64	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00	0,00	1.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	**0,00**	**320.811.213,00**	**0,00**	**851.420.119,88**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	2.090.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	11.600.000,00	0,00	36.786.100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	13,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00	0,00	242.571.035,74
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	0,00	0,00	39.730.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0,00	103.600,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Umum	0,00	634.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	105.817.400,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	55.966.200,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	143.000.000,00	0,00	134.527.433,33
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	66.798.555,56
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00	311.911.995,25

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	19.095.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	**0,00**	**73.405.485,28**	**0,00**	**404.212.131,71**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	519,33
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	226.893.886,52
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	185,28	0,00	52.866.948,86
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	64.093.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	0,00	0,00	0,00	124.450.777,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	0,00	6.478.300,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	0,00	2.834.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**0,00**	**100.712.924,00**	**0,00**	**23.545.000,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	100.712.924,00	0,00	23.545.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.360.000,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	9.360.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	**73.381.516.011,00**	**73.454.915.493,72**	**100,10**	**482.479.824,02**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	73.381.516.011,00	73.381.516.011,00	100,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	73.399.482,72	0,00	482.479.824,02
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	**0,00**	**99.105,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	99.105,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	**0,00**	**210.593.714,15**	**0,00**	**173.232.852,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	194.826.255,00	0,00	7.335.096,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	8.913.559,15	0,00	51.763.447,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	6.853.900,00	0,00	113.964.157,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	170.152,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah	**0,00**	**23.580.000,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Lapangan-Tanah untuk Jalan	0,00	23.580.000,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	**0,00**	**27.694.500,00**	**0,00**	**31.481.500,33**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	31.481.500,33
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	15.074.500,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	12.620.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	**0,00**	**47.696.309,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam	0,00	2.608.470,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	0,00	45.087.839,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.773.750,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	0,00	0,00	0,00	23.773.750,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	**0,00**	**449.997.751,22**	**0,00**	**249.173.291,33**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	995.000,00	0,00	170.285.426,31
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	224.486.451,22	0,00	68.965.865,02
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	155.301.200,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00	9.922.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-	0,00	69.215.100,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara				
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	**0,00**	**692.508.800,00**	**0,00**	**264.644.630,46**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Provinsi	0,00	692.508.800,00	0,00	264.644.630,46
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291.280.951,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	0,00	0,00	0,00	291.280.951,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	**0,00**	**4.913.580,40**	**0,00**	**133.117.433,15**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	0,00	2.420.880,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	0,00	0,00	0,00	112.556.500,55
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	0,00	0,00	0,00	20.560.932,60
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	2.492.700,40	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Tanaman	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.805.000,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanaman-Tanaman	0,00	0,00	0,00	20.805.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	**0,00**	**113.766.600,00**	**0,00**	**12.500.000,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	0,00	113.766.600,00	0,00	12.500.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	**0,00**	**33.344.503,00**	**0,00**	**0,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	33.344.503,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	**0,00**	**40.365.600,00**	**0,00**	**143.993.760,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	0,00	40.365.600,00	0,00	143.993.760,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	**0,00**	**395.502.469,50**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	0,00	373.777.469,50	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	0,00	21.725.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	**41.833.800,00**	**98.544.952,05**	**235,56**	**35.592.600,00**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD	41.833.800,00	98.544.952,05	235,56	35.592.600,00

Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp76.974.438.969,96 merupakan pengembalian ke Kas Daerah atas belanja dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya.

Tabel 7.5.32 Pendapatan BLUD – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan BLUD	**6.472.476.433,00**	**5.227.554.179,52**	**80,77**	**22.421.878.770,68**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	**3.511.985.000,00**	**3.066.021.531,00**	**87,30**	**3.701.250.776,00**
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	3.511.985.000,00	3.066.021.531,00	87,30	3.701.250.776,00
Pendapatan BLUD dari Hibah	**524.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.693.324.096,29**
Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat	0,00	0,00	0,00	3.912.900.000,00
Pendapatan BLUD dari Hibah Tidak Terikat	524.400.000,00	0,00	0,00	12.780.424.096,29
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	**1.808.636.982,00**	**1.965.913.295,00**	**108,70**	**1.248.815.078,00**
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	1.808.636.982,00	1.965.913.295,00	108,70	1.248.815.078,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	**627.454.451,00**	**195.619.353,52**	**31,18**	**778.488.820,39**
Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	88.843.155,00	139.586.765,52	157,12	79.055.935,69
Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha	535.511.296,00	56.032.588,00	10,46	699.432.884,70

Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp5.227.554.179,52 atau 80,77% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp6.472.476.433,00. Berikut dibawah ini penjelasan capaian realisasi Pendapatan BLUD:

1. Pendapatan BLUD pada 19 (sembilan belas) BLUD SMK yang ada pada Dinas Pendidikan terealisasi sebesar Rp4.112.394.906,00 atau sebesar 72,52% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.670.864.500,00. Rendahnya capaian realisasi tersebut disebabkan kendala operasional masa transisi, di mana terdapat 14 (empat belas) SMKN yang baru ditetapkan statusnya sebagai BLUD pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1407 Tahun 2024 tentang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagai Badan Layanan Umum Daerah di Provinsi Kepulauan Riau dan baru dimulai secara efektif untuk implementasi penatausahaan keuangannya di awal tahun 2025.
2. Sedangkan Pendapatan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib terealisasi sebesar Rp997.258.253,52 atau sebesar 124,41% dari target yang ditetapkan sebesar Rp801.611.933,00. Capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan dikarenakan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib menjadi salah satu rumah sakit yang mendukung program pendidikan dan pelatihan bagi siswa untuk belajar langsung dari tenaga medis profesional melalui kegiatan praktik dan magang selain itu

merupakan lokasi yang ideal bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Tanjungpinang untuk melaksanakan pendidikan berbasis rumah sakit (*hospital-based education*). Peningkatan pendapatan BLUD ini juga diperoleh dari implementasi sistem pengelolaan parkir profesional yang dikelola oleh pihak ketiga atau unit khusus parkir dengan sistem digital.

Tabel 7.5.33 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	**0,00**	**4.107.657,16**	**0,00**	**4.925.402,14**
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	**0,00**	**4.107.657,16**	**0,00**	**4.925.402,14**
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	4.107.657,16	0,00	4.925.402,14

Tabel 7.5.34 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	**100.448.400,00**	**100.448.400,00**	**100,00**	**26.034.225,00**
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	**100.448.400,00**	**100.448.400,00**	**100,00**	**26.034.225,00**
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.448.400,00	100.448.400,00	**100,00**	26.034.225,00

7.5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	2.004.127.111.802,00	**1.974.299.383.024,00**

Pendapatan Transfer adalah pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang sumber dananya berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. Alokasi Pendapatan Transfer ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Insentif Fiskal.

Pada Tahun 2024, Dana Bagi Hasil (DBH) disajikan pada kode akun objek 4.2.01.01 dengan uraian akun objek Dana Perimbangan berikut rincian objek beserta sub rincian objeknya. Selanjutnya pada Tahun 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Surat dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.13/9845/Keuda Hal Penyeragaman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur dalam Penerimaan Daerah Tanggal 15 Desember 2025 dimana akun tersebut dimutakhirkan menjadi kode akun objek 4.2.01.07 dengan uraian akun objek Dana Bagi Hasil (DBH) berikut rincian objek beserta sub rincian objeknya.

Pendapatan Transfer pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.974.299.383.024,00 atau 98,51% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp2.004.127.111.802,00 yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.35 Pendapatan Transfer – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PENDAPATAN TRANSFER	**2.004.127.111.802,00**	**1.974.299.383.024,00**	**98,51**	**1.976.533.066.207,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**2.004.127.111.802,00**	**1.974.299.383.024,00**	**98,51**	**1.976.533.066.207,00**
Dana Bagi Hasil (DBH)	**322.734.238.997,00**	**297.708.095.000,00**	**92,25**	**318.182.556.980,00**
DBH Pajak	259.185.835.999,00	235.113.496.000,00	90,71	184.411.204.980,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA)	62.391.968.998,00	61.438.165.000,00	98,47	131.955.720.000,00
DBH Lainnya	1.156.434.000,00	1.156.434.000,00	100,00	1.815.632.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	**1.199.157.170.680,00**	**1.199.371.400.647,00**	**100,02**	**1.177.916.590.123,00**
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.027.586.951.680,00	1.027.801.318.066,00	100,02	1.177.916.590.123,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya	171.570.219.000,00	171.570.082.581,00	100,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	**458.999.545.125,00**	**453.983.730.377,00**	**98,91**	**469.118.831.104,00**
DAK Fisik	92.350.324.000,00	88.988.492.951,00	96,36	157.564.483.366,00
DAK Non Fisik	366.649.221.125,00	364.995.237.426,00	99,55	311.554.347.738,00
Insentif Fiskal	**23.236.157.000,00**	**23.236.157.000,00**	**100,00**	**11.315.088.000,00**
Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	11.315.088.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	23.236.157.000,00	23.236.157.000,00	100,00	0,00

Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer selama Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

7.5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

7.5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada tahun 2025, Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp297.708.095.000,00 atau 92,25% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp322.734.238.997,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp20.474.461.980,00 atau sebesar 6,43% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp318.182.556.980,00 yang dipengaruhi oleh ketergantungan terhadap kebijakan penetapan alokasi dan pagu definitif dari Pemerintah Pusat, yang realisasinya fluktuatif mengikuti dinamika penerimaan Pajak Pusat, selain itu pemotongan penyaluran TKD oleh Pemerintah Pusat periode Desember 2025 atas Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21, Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Dana Bagi Hasil PBB untuk Provinsi yang seharusnya disalurkan sebesar 30% dari pagu alokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum dengan nilai kurang lebih sebesar Rp47.502.403.600,00 hanya disalurkan sebesar 15% dari pagu alokasi atau Rp23.751.201.800,00.

Jenis-jenis Dana Bagi Hasil (DBH) antara lain:

A. DBH Pajak

DBH Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	259.185.835.999,00	**235.113.496.000,00**

DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal, Alokasi DBH Pajak ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Insentif Fiskal. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga menerima penyaluran kurang bayar dan lebih bayar DBH Pajak pada Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 dan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

Pada tahun 2025 realisasi DBH Pajak sebesar Rp235.113.496.000,00 atau 90,71% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp259.185.835.999,00 yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.36 Dana Bagi Hasil Pajak – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
DBH Pajak	**259.185.835.999,00**	**235.113.496.000,00**	**90,71**	**184.411.204.980,00**
DBH PBB	40.492.623.000,00	37.347.858.500,00	92,23	24.469.915.000,00
DBH PPh Pasal 21	203.673.170.214,00	187.837.117.100,00	92,22	150.453.257.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	14.636.390.785,00	9.866.006.600,00	67,41	9.435.749.000,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	383.652.000,00	62.513.800,00	16,29	52.283.980,00

B. DBH Sumber Daya Alam (SDA)

DBH Sumber Daya Alam (SDA)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	62.391.968.998,00	**61.438.165.000,00**

DBH Sumber Daya Alam (SDA) adalah bagian daerah yang berasal dari Penerimaan Sumber Daya Alam Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Dan Pertambangan Panas. Alokasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga menerima penyaluran kurang bayar dan lebih bayar DBH Sumber Daya Alam (SDA) pada Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

Pada tahun 2025 DBH Sumber Daya Alam (SDA) terealisasi sebesar Rp61.438.165.000,00 atau 98,47% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp62.391.968.998,00. Rincian DBH Sumber Daya Alam (SDA) terdiri dari:

Tabel 7.5.37 DBH Sumber Daya Alam(SDA) – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
DBH Sumber Daya Alam (SDA)	**62.391.968.998,00**	**61.438.165.000,00**	**98,47**	**131.955.720.000,00**
DBH SDA Minyak Bumi	8.269.408.565,00	5.643.432.000,00	68,24	13.984.366.000,00
DBH SDA Gas Bumi	44.486.670.434,00	47.112.647.000,00	105,90	108.952.867.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	1.462.060.420,00	1.353.155.000,00	92,55	1.314.397.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	5.174.137.579,00	5.283.043.000,00	102,10	4.857.165.000,00
DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	172.804.000,00	172.804.000,00	100,00	85.688.000,00
DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	1.055.000,00	1.055.000,00	100,00	0,00
DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	2.825.833.000,00	1.872.029.000,00	66,25	2.761.237.000,00

C. DBH Lainnya

DBH Lainnya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.156.434.000,00	**1.156.434.000,00**

DBH Lainnya adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara tertentu untuk mendukung desentralisasi, terutama untuk mendukung fungsi spesifik. Alokasi DBH Lainnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan pengelolaannya diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

Pada tahun 2025 DBH Lainnya terealisasi sebesar Rp1.156.434.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.156.434.000,00. Berikut tabel rincian DBH Lainnya:

Tabel 7.5.38 DBH Lainnya – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
DBH Lainnya	**1.156.434.000,00**	**1.156.434.000,00**	**100,00**	**1.815.632.000,00**
DBH Sawit	1.156.434.000,00	1.156.434.000,00	100,00	1.815.632.000,00

7.5.1.1.2.2.1 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.199.157.170.680,00	**1.199.371.400.647,00**

Dana Alokasi Umum merupakan pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi Dana

Alokasi Umum pada tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan pengelolaannya diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum

Pada tahun 2025 Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp1.199.371.400.647,00 atau 100,02%, dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.199.157.170.680,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp21.454.810.524,00 atau sebesar 1,82% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.177.916.590.123,00 yang dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat dalam meningkatkan alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*) demi mendukung pendanaan belanja pegawai formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.

Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) terdiri dari:

Tabel 7.5.39 Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Dana Alokasi Umum (DAU)	**1.199.157.170.680,00**	**1.199.371.400.647,00**	**100,02**	**1.177.916.590.123,00**
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	**1.027.586.951.680,00**	**1.027.801.318.066,00**	**100,02**	**1.177.916.590.123,00**
DAU	1.027.586.951.680,00	1.027.801.318.066,00	100,02	1.177.916.590.123,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya	**171.570.219.000,00**	**171.570.082.581,00**	**100,00**	**0,00**
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	83.540.028.000,00	83.539.891.581,00	100,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	74.094.740.000,00	74.094.740.000,00	100,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	13.935.451.000,00	13.935.451.000,00	100,00	0,00

7.5.1.1.2.3.1 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	458.999.545.125,00	**453.983.730.377,00**

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Jenis Dana Alokasi Khusus terdiri atas :

a) Dana Alokasi Khusus Fisik
b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Pada tahun 2025 Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar Rp453.983.730.377,00 atau 98,91%, dari yang ditargetkan dalam APBD sebesar Rp458.999.545.125,00. Pada tahun 2025, realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp15.135.100.727,00 atau sebesar 3,23% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp469.118.831.104,00 yang dipengaruhi oleh ketergantungan terhadap kebijakan penetapan alokasi dan pagu definitif dari Pemerintah Pusat, selain itu dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 akibat dari kebijakan pemerintah terkait dengan pencadangan transfer ke daerah menyebabkan pengurangan alokasi DAK Fisik untuk bagian pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Rincian realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.40 Dana Alokasi Khusus – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Dana Alokasi Khusus (DAK)	**458.999.545.125,00**	**453.983.730.377,00**	**98,91**	**469.118.831.104,00**
DAK Fisik	92.350.324.000,00	88.988.492.951,00	96,36	157.564.483.366,00
DAK Non Fisik	366.649.221.125,00	364.995.237.426,00	99,55	311.554.347.738,00

A. DAK Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Pada tahun 2025 DAK Fisik terealisasi sebesar Rp88.988.492.951,00 atau 96,36%, dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp92.350.324.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.41 Dana Alokasi Khusus Fisik – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
DAK Fisik	**92.350.324.000,00**	**88.988.492.951,00**	**96,36**	**157.564.483.366,00**
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	445.976.000,00	441.556.000,00	**99,01**	48.956.011.194,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	0,00	0,00	0,00	2.818.515.575,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	10.500.000.000,00	10.283.984.489,00	97,94	38.425.722.123,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	4.341.516.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	3.074.134.186,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	11.741.796.103,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	27.437.144.515,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan	0,00	0,00	0,00	22.172.209.670,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	77.062.832.000,00	74.535.250.272,00	96,72	2.938.950.000,00
DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	3.727.702.190,00	0,00	0,00

B. DAK Non Fisik

DAK Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

Pengelolaan DAK Non Fisik diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

DAK Non Fisik terdiri dari beberapa jenis antara lain:

1) Dana BOS Reguler
2) Dana BOS Kinerja
3) Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
4) Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
5) Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
6) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya
7) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
8) Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana-Keluarga Berencana
9) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
10) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
11) Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM

12) Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana

DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Kinerja pada tahun 2025 tidak ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah akan tetapi langsung disalurkan ke masing-masing Rekening Satuan Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Sementara itu, penyaluran DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Guru Aparatur Sipil Negara Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/MK/PK/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 Tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Daerah.

Pada tahun 2025 DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp364.995.237.426,00 atau 99,55%, dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp366.649.221.125,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.42 DAK Non Fisik – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
DAK Non Fisik	**366.649.221.125,00**	**364.995.237.426,00**	99,55	**311.554.347.738,00**
DAK Non Fisik-BOS Reguler	199.623.598.000,00	197.849.635.997,00	99,11	189.107.070.439,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.825.750.000,00	4.825.750.000,00	100,00	4.712.500.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	135.372.807.000,00	135.956.861.200,00	100,43	104.615.759.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.002.500.000,00	1.848.250.000,00	92,30	2.977.250.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.430.251.000,00	1.343.507.500,00	93,94	1.042.018.000,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	999.000.000,00	999.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	13.200.522.495,00	13.200.522.495,00	100,00	3.411.365.644,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	1.559.088.702,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.881.478.000,00	3.658.395.604,00	94,25	3.725.918.697,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	445.954.630,00	445.954.630,00	100,00	403.377.256,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	27.360.000,00	27.360.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	4.640.000.000,00	4.640.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00

1) DAK Non Fisik-BOS Reguler

DAK Non Fisik-BOS Reguler	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	199.623.598.000,00	**197.849.635.997,00**

DAK Non Fisik Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik-BOS Reguler adalah Dana BOS yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 2025, DAK Non Fisik-BOS Reguler terealisasi sebesar Rp197.849.635.997,00 atau 99,11% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp199.623.598.000,00.

2) DAK Non Fisik-BOS Kinerja

DAK Non Fisik-BOS Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	4.825.750.000,00	**4.825.750.000,00**

DAK Non Fisik Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik-BOS Kinerja adalah Dana BOS yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik. Pada tahun 2025, DAK Non Fisik-BOS Kinerja terealisasi sebesar Rp4.825.750.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp4.825.750.000,00.

3) DAK Non Fisik-TPG PNSD

DAK Non Fisik-TPG PNSD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	135.372.807.000,00	**135.956.861.200,00**

DAK Non Fisik Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik-TPG PNSD merupakan tunjangan profesi yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2025, DAK Non Fisik-TPG PNSD terealisasi sebesar Rp135.956.861.200,00 atau 100,43% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp135.372.807.000,00.

4) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD

DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	2.002.500.000,00	**1.848.250.000,00**

DAK Non Fisik Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah dan guru pemerintah dengan perjanjian kerja yang belum mendapatkan TPG PNSD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2025, DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD terealisasi sebesar Rp1.848.250.000,00 atau 92,30% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp2.002.500.000,00.

5) DAK Non Fisik-TKG PNSD

DAK Non Fisik-TKG PNSD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.430.251.000,00	**1.343.507.500,00**

DAK Non Fisik Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik-TKG PNSD merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan. Pada tahun 2025, DAK Non Fisik-TKG PNSD terealisasi sebesar Rp1.343.507.500,00 atau 93,94% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.430.251.000,00.

6) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum

DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	999.000.000,00	**999.000.000,00**

DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum adalah dana alokasi khusus nonfisik yang digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas pengelolaan Taman Budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2025, penggunaan DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum terealisasi sebagai DAK Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah yang peruntukannya untuk meningkatkan kualitas layanan dan literasi, bukan untuk pembangunan fisik sebesar Rp999.000.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp999.000.000,00.

7) DAK Non Fisik-PK2UKM

DAK Non Fisik-PK2UKM	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	13.200.522.495,00	**13.200.522.495,00**

DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik-PK2UKM adalah dana yang digunakan untuk membantu mendanai kegiatan peningkatan kapasitas koperasi, dan usaha

kecil dan menengah. Pada tahun 2025, DAK Non Fisik-PK2UKM terealisasi sebesar Rp13.200.522.495,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp13.200.522.495,00.

8) DAK Non Fisik-BOKB-KB

DAK Non Fisik-BOKB-KB	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	3.881.478.000,00	3.658.395.604,00

DAK Non Fisik Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana-Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik-BOKB-KB adalah dana yang digunakan untuk meningkatkan keikutsertaan KB dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata. Pada tahun 2025, DAK Non Fisik-BOKB-KB terealisasi sebesar Rp3.658.395.604,00 atau 94,25% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.881.478.000,00.

9) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	445.954.630,00	445.954.630,00

DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang. Pada tahun 2025, DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak terealisasi sebesar Rp445.954.630,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp445.954.630,00.

10) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	27.360.000,00	27.360.000,00

DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan mendukung operasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian. Pada tahun 2025, DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian terealisasi sebesar Rp27.360.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp27.360.000,00.

11) DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM

DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	4.640.000.000,00	4.640.000.000,00

DAK Nonfisik Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM adalah dana alokasi khusus nonfisik yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Sentra IKM yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Pada tahun 2025, DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM terealisasi sebesar Rp4.640.000.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp4.640.000.000,00.

12) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana

DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	200.000.000,00	200.000.000,00

DAK Nonfisik Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana adalah dana alokasi khusus nonfisik yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kedaerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan capaian pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Pada tahun 2025, DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana terealisasi sebesar Rp200.000.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp200.000.000,00.

7.5.1.1.2.4.1 Insentif Fiskal - LRA

Insentif Fiskal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	23.236.157.000,00	23.236.157.000,00

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah atas pencapaian Kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Pada tahun 2025 Insentif Fiskal terealisasi sebesar Rp23.236.157.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp23.236.157.000,00. Alokasi Insentif Fiskal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 428 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Daerah Peringkat Terbaik dalam Rangka

Penghitungan Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.

Sementara itu, realisasi penerimaan Insentif Fiskal pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp11.921.069.000,00 atau sebesar 105,36% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp11.315.088.000,00, dipengaruhi oleh pemutakhiran data dana insentif fiskal tahun anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya yang didukung oleh keberhasilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan capaian penilaian kinerja daerah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah.

Rincian Insentif Fiskal terdiri dari:

Tabel 7.5.43 Insentif Fiskal – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Insentif Fiskal	**23.236.157.000,00**	**23.236.157.000,00**	**100,00**	**11.315.088.000,00**
Insentif Fiskal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.315.088.000,00**
Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	11.315.088.000,00
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	**23.236.157.000,00**	**23.236.157.000,00**	**100,00**	**0,00**
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	23.236.157.000,00	23.236.157.000,00	100,00	0,00

7.5.1.1.3. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.324.102.500,00	**1.798.843.934,57**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan hibah/sumbangan pihak ketiga dan Pendapatan Hibah dari Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Pada tahun anggaran 2025 penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp1.798.843.934,57 atau 135,85% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.324.102.500,00 yang merupakan Sumbangan Hibah dari PT. Jasa Raharja kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara PT. Jasa Raharja Kantor Wilayah Kepulauan Riau dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Dana Hibah kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk Mendukung Operasional Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Nomor P/21/SP/2025 dan Nomor 510/MOU/BAPENDA/2025 tanggal 11 Juni 2025, dengan nilai NPHD sebesar

Rp1.294.704.000,00 dan juga berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis yang merupakan pengembalian atas penutupan rekening dana Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP) yang dikembalikan ke Kas Daerah.

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp498.312.343,57 atau sebesar 38,32% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.300.531.591,00, dipengaruhi oleh pengembalian atas penutupan rekening dana Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP) yang tidak lagi dipungut oleh satuan pendidikan.

Tabel 7.5.44 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**1.324.102.500,00**	**1.798.843.934,57**	**135,85**	**1.300.531.591,00**
Pendapatan Hibah	**1.324.102.500,00**	**1.798.843.934,57**	**135,85**	**1.300.531.591,00**
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	**1.324.102.500,00**	**1.294.704.000,00**	97,78	**1.292.700.000,00**
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	1.324.102.500,00	1.294.704.000,00	97,78	1.292.700.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	**0,00**	**504.139.934,57**	**0,00**	**7.831.591,00**
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	504.139.934,57	0,00	7.831.591,00

7.5.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran melalui Rekening Kas Umum Daerah dan Kas Badan Layanan Umum Daerah serta Belanja Operasional Satuan Pendidikan yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan, dan Pemerintah Daerah tidak akan memperoleh pembayarannya kembali.

Tabel 7.5.45 Belanja Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
BELANJA DAERAH	**3.932.501.110.900,44**	**3.715.604.258.925,54**	**94,48**	**4.071.747.457.825,29**
BELANJA OPERASI	**2.944.090.151.988,51**	**2.779.255.950.571,38**	**94,40**	**2.987.193.758.080,43**
Belanja Pegawai	1.468.712.653.029,50	1.448.897.643.513,04	98,65	1.309.833.869.704,00
Belanja Barang dan Jasa	1.294.788.524.618,62	1.161.921.240.159,38	89,74	1.311.138.772.714,16
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	3.692.560.273,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Subsidi	2.864.494.061,38	834.852.991,00	29,14	944.301.180,00
Belanja Hibah	174.868.035.279,01	165.767.273.907,96	94,80	357.581.329.209,27
Belanja Bantuan Sosial	2.856.445.000,00	1.834.940.000,00	64,24	4.002.925.000,00
BELANJA MODAL	**269.313.511.475,33**	**232.159.877.710,16**	**86,20**	**307.344.075.589,86**
Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	992.100.000,00	99,21	920.100.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.735.653.121,33	81.499.424.632,00	91,85	115.508.155.838,84
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.492.416.281,00	80.799.961.394,06	85,51	129.103.961.833,55
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.989.061.381,00	46.310.371.998,10	74,71	36.791.762.576,47
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.970.627.692,00	21.957.775.186,00	99,94	19.630.419.447,00
Belanja Modal Aset Lainnya	1.125.753.000,00	600.244.500,00	53,32	5.389.675.894,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**2.281.396.903,60**	**0,00**	**0,00**	**2.065.423.140,00**
Belanja Tidak Terduga	2.281.396.903,60	0,00	0,00	2.065.423.140,00
BELANJA TRANSFER	**716.816.050.533,00**	**704.188.430.644,00**	**98,24**	**775.144.201.015,00**
Belanja Bagi Hasil	698.706.050.533,00	690.951.951.944,00	98,89	748.291.201.015,00
Belanja Bantuan Keuangan	18.110.000.000,00	13.236.478.700,00	73,09	26.853.000.000,00

7.5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	2.944.090.151.988,51	**2.779.255.950.571,38**

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menganggarkan belanja operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.779.255.950.571,38 dengan realisasi belanja operasi sebesar Rp2.944.090.151.988,51 atau 94,40%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.46 Belanja Operasi – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
BELANJA OPERASI	**2.944.090.151.988,51**	**2.779.255.950.571,38**	**94,40**	**2.987.193.758.080,43**
Belanja Pegawai	1.468.712.653.029,50	1.448.897.643.513,04	98,65	1.309.833.869.704,00
Belanja Barang dan Jasa	1.294.788.524.618,62	1.161.921.240.159,38	89,74	1.311.138.772.714,16

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	3.692.560.273,00
Belanja Subsidi	2.864.494.061,38	834.852.991,00	29,14	944.301.180,00
Belanja Hibah	174.868.035.279,01	165.767.273.907,96	94,80	357.581.329.209,27
Belanja Bantuan Sosial	2.856.445.000,00	1.834.940.000,00	64,24	4.002.925.000,00

7.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.468.712.653.029,50	**1.448.897.643.513,04**

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran anggaran untuk belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS lainnya yang diberikan kepada ASN, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta DPRD yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada tahun 2025 Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.448.897.643.513,04 atau 98,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.468.712.653.029,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.47 Belanja Pegawai – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Pegawai	**1.468.712.653.029,50**	**1.448.897.643.513,04**	**98,65**	**1.309.833.869.704,00**
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	600.193.813.071,18	586.350.321.322,04	97,69	477.549.846.508,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	804.172.071.553,69	791.519.964.438,00	98,43	608.621.438.978,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	169.973.975.468,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.638.611.361,63	29.023.911.364,00	97,93	28.329.573.243,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.636.639.187,00	1.186.363.100,00	72,49	1.321.600.258,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.000.017.856,00	3.000.017.856,00	100,00	2.808.613.442,00
Belanja Pegawai BLUD	30.071.500.000,00	37.817.065.433,00	125,76	21.228.821.807,00

Secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7.5.48 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	**600.193.813.071,18**	**586.350.321.322,04**	**97,69**	**477.549.846.508,00**
Belanja Gaji Pokok ASN	**442.751.060.874,89**	**435.076.249.629,00**	**98,27**	**347.456.590.539,00**
Belanja Gaji Pokok PNS	266.419.426.814,17	262.871.998.669,00	98,67	262.185.101.679,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	176.331.634.060,72	172.204.250.960,00	97,66	85.271.488.860,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	**40.002.902.494,73**	**38.377.680.246,00**	**95,94**	**32.159.667.412,00**
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	26.003.522.752,87	25.549.897.312,00	98,26	25.661.636.316,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	13.999.379.741,86	12.827.782.934,00	91,63	6.498.031.096,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	**7.426.769.866,11**	**7.242.260.000,00**	**97,52**	**7.454.500.540,00**
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.426.769.866,11	7.242.260.000,00	97,52	7.454.500.540,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	**33.912.886.509,62**	**32.731.834.664,00**	**96,52**	**31.716.949.000,00**
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	23.398.497.709,41	22.361.026.000,00	95,57	23.017.341.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	10.514.388.800,21	10.370.808.664,00	98,63	8.699.608.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	**7.510.863.393,99**	**7.305.948.000,00**	**97,27**	**3.119.158.575,00**
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.949.043.534,55	2.854.048.000,00	96,78	3.119.158.575,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.561.819.859,44	4.451.900.000,00	97,59	-
Belanja Tunjangan Beras ASN	**24.736.981.810,36**	**24.093.228.750,00**	**97,40**	**19.155.886.620,00**
Belanja Tunjangan Beras PNS	14.463.125.776,12	14.230.819.680,00	98,39	14.462.056.740,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.273.856.034,24	9.862.409.070,00	96,00	4.693.829.880,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	**706.535.280,67**	**582.098.638,00**	**82,39**	**731.608.684,00**
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	704.535.280,67	582.098.638,00	82,62	731.608.684,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	**7.986.161,71**	**6.795.021,04**	**85,08**	**5.104.961,00**
Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.059.774,75	3.391.141,00	83,53	3.792.904,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.926.386,96	3.403.880,04	86,69	1.312.057,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	**38.861.392.025,63**	**37.246.323.224,00**	**95,84**	**32.885.612.268,00**
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	26.352.259.536,41	24.911.083.101,00	94,53	25.427.096.918,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	12.509.132.489,22	12.335.240.123,00	98,61	7.458.515.350,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	**957.554.960,92**	**921.986.776,00**	**96,29**	**716.293.080,00**
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	565.246.136,40	540.556.715,00	95,63	539.228.613,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	392.308.824,52	381.430.061,00	97,23	177.064.467,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	**2.823.755.425,61**	**2.765.916.374,00**	**97,95**	**2.148.474.829,00**
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.658.753.392,77	1.621.673.662,00	97,76	1.617.303.623,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.165.002.032,84	1.144.242.712,00	98,22	531.171.206,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	**495.124.266,94**	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	475.978.058,94	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	19.146.208,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 7.5.49 Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	**804.172.071.553,69**	**791.519.964.438,00**	**98,43**	**608.621.438.978,00**
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	**406.065.743.134,37**	**399.289.809.644,00**	**98,33**	**383.939.228.872,00**
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	314.106.854.381,00	307.767.304.098,00	97,98	302.169.551.682,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	91.958.888.753,37	91.522.505.546,00	99,53	81.769.677.190,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	**1.132.056.882,28**	**1.091.725.590,00**	**96,44**	**1.093.645.059,00**
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1.065.778.050,08	1.025.539.188,00	96,22	1.027.468.927,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	66.278.832,20	66.186.402,00	99,86	66.176.132,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	**36.290.686.728,98**	**35.417.223.095,00**	**97,59**	**35.683.949.932,00**
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	35.816.651.486,96	34.971.761.906,00	97,64	35.287.140.917,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	474.035.242,02	445.461.189,00	93,97	396.809.015,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	**9.981.758.365,96**	**9.618.291.967,00**	**96,36**	**9.610.563.036,00**
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	9.412.758.366,00	9.145.969.114,00	97,17	9.018.367.451,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	568.999.999,96	472.322.853,00	83,01	592.195.585,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	**185.423.502.111,55**	**181.686.068.322,00**	**97,98**	**178.294.052.079,00**
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	180.823.345.622,39	177.139.703.442,00	97,96	174.137.293.232,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	4.600.156.489,16	4.546.364.880,00	98,83	4.156.758.847,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	**165.278.324.330,55**	**164.416.845.820,00**	**99,48**	**0,00**
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor	8.864.802.989,28	8.835.118.721,00	99,67	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.168.387.756,00	5.165.704.270,00	99,95	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.203.407.147,00	10.161.640.029,00	99,59	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan	727.513.130,27	720.552.100,00	99,04	0,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	136.745.346.208,00	136.231.823.200,00	99,62	0,00
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.456.117.100,00	1.343.507.500,00	92,27	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.112.750.000,00	1.958.500.000,00	92,70	0,00

Pada Tahun 2024, akun objek Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN disajikan pada kode akun objek 5.1.01.03 berikut rincian objek beserta sub rincian objeknya. Selanjutnya pada Tahun 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana akun tersebut dimutakhirkan menjadi kode akun rincian objek 5.1.01.02.06 berikut sub rincian objeknya. Pengecualiannya untuk sub rincian objek Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (5.1.01.03.07.0001) dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (5.1.01.03.07.0002) dimutakhirkan menjadi kode akun rincian sub objek 5.1.02.02.01.0080 dan 5.1.02.02.01.0081.

Tabel 7.5.50 Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.973.975.468,00**
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.609.488.780,00**
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	13.315.589.697,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	11.354.921.446,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	9.938.977.637,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.322.822.388,00**
Belanja TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	103.322.822.388,00
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.189.209.900,00**
Belanja TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	1.189.209.900,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.977.250.000,00**
Belanja Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	2.977.250.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.800.000,00**
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00
Belanja Honorarium	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.846.404.400,00**
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	27.457.284.400,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	389.120.000,00

Tabel 7.5.51 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	**29.638.611.361,63**	**29.023.911.364,00**	**97,93**	**28.329.573.243,00**
Belanja Uang Representasi DPRD	**1.420.800.000,00**	**1.420.800.000,00**	**100,00**	**1.297.950.000,00**
Belanja Uang Representasi DPRD	1.420.800.000,00	1.420.800.000,00	100,00	1.297.950.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	**174.141.000,00**	**174.141.000,00**	100,00	**163.521.000,00**
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	174.141.000,00	174.141.000,00	**100,00**	163.521.000,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	**131.949.240,00**	**131.949.240,00**	**100,00**	**131.080.200,00**
Belanja Tunjangan Beras DPRD	131.949.240,00	131.949.240,00	100,00	131.080.200,00
Belanja Uang Paket DPRD	**122.040.000,00**	**122.040.000,00**	**100,00**	**119.775.000,00**
Belanja Uang Paket DPRD	122.040.000,00	122.040.000,00	100,00	119.775.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	**2.060.160.000,00**	**2.060.160.000,00**	**100,00**	**1.882.027.500,00**
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.060.160.000,00	2.060.160.000,00	100,00	1.882.027.500,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	**97.875.000,00**	**97.875.000,00**	**100,00**	**80.866.500,00**
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	97.875.000,00	97.875.000,00	100,00	80.866.500,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	**8.040.000.000,00**	**8.040.000.000,00**	**100,00**	**7.920.000.000,00**
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.040.000.000,00	8.040.000.000,00	100,00	7.920.000.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	**2.025.000.000,00**	**2.025.000.000,00**	**100,00**	**1.320.000.000,00**
Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.025.000.000,00	2.025.000.000,00	100,00	1.320.000.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	**17.947.161,62**	**17.847.164,00**	**99,44**	**21.514.303,00**
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	17.947.161,62	17.847.164,00	99,44	21.514.303,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	**8.297.298.960,00**	**8.297.298.960,00**	**100,00**	**8.123.138.740,00**
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	125.583.120,00	125.583.120,00	100,00	91.618.740,00
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.928.960,00	2.928.960,00	100,00	2.880.000,00
Belanja Jaminan Kematian DPRD	8.786.880,00	8.786.880,00	100,00	8.640.000,00
Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	8.160.000.000,00	8.160.000.000,00	100,00	8.020.000.000,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	**6.636.800.000,00**	**6.636.800.000,00**	**100,00**	**6.664.000.000,00**
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.636.800.000,00	6.636.800.000,00	100,00	6.664.000.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	**614.600.000,01**	**0,00**	**0,00**	**605.700.000,00**
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	614.600.000,01	0,00	0,00	605.700.000,00

Tabel 7.5.52 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	**1.636.639.187,00**	**1.186.363.100,00**	**72,49**	**1.321.600.258,00**
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	**138.000.000,00**	**138.000.000,00**	**100,00**	**75.600.000,00**
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	138.000.000,00	138.000.000,00	100,00	75.600.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	**3.696.000,00**	**3.696.000,00**	**100,00**	**0,00**
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.696.000,00	3.696.000,00	100,00	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	**131.760.000,00**	**131.760.000,00**	**100,00**	**136.080.000,00**
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	131.760.000,00	131.760.000,00	100,00	136.080.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	**3.910.680,00**	**3.910.680,00**	**100,00**	**1.738.080,00**
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.910.680,00	3.910.680,00	100,00	1.738.080,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	**3.264.204,00**	**2.794.718,00**	**85,62**	**3.860.241,00**
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.264.204,00	2.794.718,00	85,62	3.860.241,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	**1.720,00**	**1.720,00**	**100,00**	**1.920,00**
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.720,00	1.720,00	100,00	1.920,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	**8.628.480,00**	**7.392.000,00**	**85,67**	**7.257.600,00**
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.628.480,00	7.392.000,00	85,67	7.257.600,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	**155.520,00**	**155.520,00**	**100,00**	**155.520,00**
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	155.520,00	100,00	155.520,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	**466.560,00**	**466.560,00**	**100,00**	**466.560,00**
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	466.560,00	100,00	466.560,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	**1.346.756.023,00**	**898.185.902,00**	**66,69**	**1.096.440.337,00**
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	400.894.426,00	296.322.106,00	73,92	404.038.707,00
Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	390.075.361,00	191.053.029,00	48,98	336.719.737,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	518.978.338,00	383.604.119,00	73,92	355.681.893,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	36.807.898,00	27.206.648,00	73,92	0,00

Tabel 7.5.53 Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	**3.000.017.856,00**	**3.000.017.856,00**	**100,00**	**2.808.613.442,00**
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	**360.000.000,00**	**360.000.000,00**	**100,00**	**300.000.000,00**
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00	300.000.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	**2.640.017.856,00**	**2.640.017.856,00**	**100,00**	**2.508.613.442,00**
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	2.640.017.856,00	2.640.017.856,00	100,00	2.508.613.442,00

Tabel 7.5.54 Belanja Pegawai BLUD – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Pegawai BLUD	**30.071.500.000,00**	**37.817.065.433,00**	**125,76**	**21.228.821.807,00**
Belanja Pegawai BLUD	30.071.500.000,00	37.817.065.433,00	125,76	21.228.821.807,00

Realisasi Belanja pegawai menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.55 Realisasi Belanja Pegawai menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA PEGAWAI
A	**PELAYANAN UMUM**	

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA PEGAWAI
1	Badan Kepegawaian dan KORPRI	16.272.866.469,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.174.112.006,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	23.819.298.523,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.570.064.080,00
5	Badan Pendapatan Daerah	70.191.130.509,00
6	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.139.971.973,00
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	9.692.655.828,00
8	Badan Penghubung Daerah	4.136.024.023,00
9	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	20.866.488.787,00
10	Biro Umum	85.974.425.022,00
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.922.255.246,00
12	Dinas Kebudayaan	8.184.419.188,00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	28.979.693.270,00
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8.635.603.158,04
15	Dinas Kesehatan	22.202.635.160,00
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	18.727.684.450,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.552.448.992,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.406.028.642,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	28.352.080.555,00
20	Dinas Pariwisata	10.235.310.166,00
21	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	21.329.695.335,00
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.982.142.287,00
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	9.394.909.840,00
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	11.835.017.567,00
25	Dinas Pendidikan	626.966.334.306,00
26	Dinas Perhubungan	13.842.208.922,00
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.860.089.020,00
28	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	14.304.233.670,00
29	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.744.445.455,00
30	Dinas Sosial	9.893.796.469,00
31	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	25.019.956.534,00
32	Inspektorat	31.443.209.193,00
33	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	55.672.115.260,00
34	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	127.306.623.672,00
35	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	16.545.804.796,00
36	Sekretariat DPRD	47.721.865.140,00
	JUMLAH	**1.448.897.643.513,04**

7.5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.294.788.524.618,62	**1.161.921.240.159,38**

Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran anggaran untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pada tahun 2025 Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp1.161.921.240.159,38 atau sebesar 89,74%, dari yang dianggarkan sebesar Rp1.294.788.524.618,62.

Rincian Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.56 Belanja Barang dan Jasa – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Barang dan Jasa	**1.294.788.524.618,62**	**1.161.921.240.159,38**	**89,74**	**1.311.138.772.714,16**
Belanja Barang	367.769.476.420,29	314.317.487.277,45	85,47	293.215.797.830,25
Belanja Jasa	488.652.796.542,19	446.336.500.472,61	91,34	518.729.152.485,59
Belanja Pemeliharaan	56.389.648.454,20	41.750.101.777,92	74,04	68.400.450.864,92
Belanja Perjalanan Dinas	96.421.983.923,55	87.845.288.867,00	91,11	125.068.460.538,50
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	28.999.883.800,00	28.419.098.677,00	98,00	54.371.556.702,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	106.842.994.373,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP	116.987.962.046,00	113.061.921.817,84	96,64	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	139.566.773.432,39	130.190.841.269,56	93,28	144.510.359.919,90

Secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7.5.57 Rincian Belanja Barang – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Barang	**367.769.476.420,29**	**314.317.487.277,45**	85,47	**293.215.797.830,25**
Belanja Barang Pakai Habis	**363.035.593.254,29**	**311.125.390.664,45**	**85,70**	**293.189.475.830,25**
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.814.378.927,91	2.063.229.212,26	73,31	3.392.570.000,44
Belanja Bahan-Bahan Kimia	698.491.470,00	625.539.461,00	89,56	140.667.650,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	21.552.708.360,43	21.375.961.177,00	99,18	23.860.809.937,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	591.550.335,00	534.126.169,00	90,29	1.036.749.870,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	455.570.598,00	448.880.598,00	98,53	197.617.400,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	41.753.805,00	41.273.458,00	98,85	58.325.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	39.707.106,00	35.436.900,00	89,25	23.060.400,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	176.292.000,00	173.761.300,00	98,56	70.083.500,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.859.857.605,00	1.761.782.609,00	36,25	1.360.837.750,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.463.395.749,00	2.366.970.664,00	96,09	3.480.796.200,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.592.594.180,00	1.591.369.258,00	99,92	508.839.694,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	32.402.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	704.700,00	682.650,00	96,87	8.891.830,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	49.964.720,00	48.963.397,00	98,00	60.885.892,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	132.640.230,00	130.895.085,00	98,68	71.607.540,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	138.861.000,00	137.500.000,00	99,02	136.180.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.881.100.527,29	4.464.962.218,00	91,47	4.590.617.811,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.450.095.047,42	4.107.915.326,00	92,31	4.356.185.789,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.378.585.770,73	13.780.092.602,00	89,61	11.917.286.335,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	760.794.337,47	617.061.095,00	81,11	861.015.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	1.956.583.685,57	1.757.902.285,00	89,85	1.187.045.509,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.294.125.305,53	3.914.865.593,00	91,17	5.050.087.960,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.249.389.412,00	2.084.083.726,00	92,65	2.395.812.193,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.176.342.262,38	909.697.324,00	77,33	1.366.250.697,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	46.052.480,00	45.411.100,00	98,61	30.378.400,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	211.305.250,00	187.325.905,00	88,65	481.819.200,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.175.460.051,00	2.981.531.887,00	93,89	2.465.411.600,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.507.487.267,00	2.336.678.826,00	93,19	4.326.815.654,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	4.895.297.449,87	3.157.835.511,00	64,51	69.906.799,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.541.413.580,50	1.872.918.673,25	73,70	4.134.276.337,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	211.314.911.457,50	175.182.869.189,94	82,90	154.789.780.745,81
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	10.357.659.163,00	9.335.314.701,00	90,13	2.603.844.025,00
Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	907.200,00	816.000,00	89,95	0,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.008.655.725,63	2.891.656.764,00	96,11	1.157.134.653,00
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	191.448.240,00	189.755.150,00	99,12	47.626.605,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.425.325.585,69	1.408.820.658,00	98,84	3.350.629.472,00
Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.967.300,00
Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.022.325.042,37	19.199.832.819,00	91,33	19.906.755.082,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.367.405.870,00	10.017.931.683,00	96,63	11.875.253.948,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	30.672.000,00	24.864.000,00	81,06	20.925.000,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	797.557.000,00	666.417.000,00	83,56	171.006.000,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	88.413.600,00	56.828.000,00	64,28	95.951.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.078.657.804,00	13.874.781.259,00	92,02	14.757.583.540,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	287.500.000,00	287.105.000,00	99,86	275.250.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	0,00	715.500.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.379.649.500,00	1.227.862.525,00	89,00	1.767.779.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	507.260.196,00	488.477.125,00	96,30	1.170.716.012,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	4.400.000,00	4.398.000,00	99,95	2.400.000,00
Belanja Pakaian Penyelamatan	696.000,00	690.000,00	99,14	598.000,00
Belanja Pakaian Teknik	0,00	0,00	0,00	49.950.000,00
Belanja Pakaian KORPRI	16.897.000,00	15.717.600,00	93,02	26.040.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	425.100.000,00	420.536.470,00	98,93	1.023.895.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	313.758.102,00	305.208.430,00	97,28	228.843.300,00
Belanja Pakaian Olahraga	1.825.108.055,00	1.538.481.630,00	84,30	1.105.052.700,00
Belanja Pakaian Paskibraka	236.407.500,00	235.447.650,00	99,59	235.420.000,00
Belanja Pakaian Jas/Safari	219.375.000,00	193.925.001,00	88,40	132.340.000,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	**4.575.000,00**	**4.420.000,00**	**96,61**	**5.123.000,00**
Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	4.575.000,00	4.420.000,00	96,61	2.028.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00
Belanja Pipa-Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00	515.000,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	**4.729.308.166,00**	**3.187.676.613,00**	**67,40**	**21.199.000,00**
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	360.000,00	88.800,00	24,67	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	25.929.600,00	23.176.800,00	89,38	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	2.057.940,00	990.990,00	48,15	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	78.925.005,00	51.154.000,00	64,81	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	24.120.000,00	21.950.000,00	91,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	7.997.200,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	11.940.000,00	11.940.000,00	100,00	3.800.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	12.199.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	17.800.000,00	17.500.000,00	98,31	5.200.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	13.240.080,00	13.199.999,00	99,70	0,00
Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	4.432.856.341,00	2.964.199.980,00	66,87	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	50.958.000,00	50.590.469,00	99,28	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial	20.988.000,00	20.851.681,00	99,35	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	2.664.000,00	2.645.405,00	99,30	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	9.472.000,00	9.388.489,00	99,12	0,00

Tabel 7.5.58 Rincian Belanja Jasa – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Jasa	**488.652.796.542,19**	**446.336.500.472,61**	91,34	**518.729.152.485,59**
Belanja Jasa Kantor	**337.286.197.636,39**	**310.444.272.893,34**	92,04	**376.907.284.456,71**
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.310.049.054,00	5.497.059.500,00	87,12	6.937.009.500,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.239.420.000,00	8.067.892.000,00	97,92	9.779.920.999,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.242.190.000,00	2.034.450.225,00	90,73	1.184.198.514,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	402.180.000,00	399.180.000,00	99,25	685.000.000,00
Honorarium Penyelenggara Ujian	57.326.000,00	42.560.000,00	74,24	20.239.500,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	9.030.570.000,00	8.440.970.000,00	93,47	1.778.520.000,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	390.000.000,00	386.000.000,00	98,97	383.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	76.441.161.184,33	76.021.181.266,48	99,45	85.362.384.937,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.007.330.486,00	9.299.473.121,00	92,93	17.100.722.366,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	43.306.680,00	38.188.400,00	88,18	0,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.027.364.193,00	837.832.597,00	81,55	1.877.924.942,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	742.370.000,00	718.130.000,00	96,73	1.309.315.952,00
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	207.133.470,00	188.093.787,00	90,81	363.657.394,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	309.410.000,00	254.473.010,00	82,24	1.114.065.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	59.558.409.760,08	57.953.705.364,00	97,31	126.845.491.824,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.175.575.552,00	4.157.541.962,00	99,57	12.744.400.349,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.609.394.367,68	8.257.056.358,00	95,91	8.833.310.669,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	16.505.702.314,00	15.096.394.859,00	91,46	14.805.415.085,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.762.848.754,04	3.610.623.736,00	95,95	3.082.744.623,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	2.763.968.227,62	2.214.822.545,00	80,13	989.499.477,00
Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	450.000.000,00	350.000.000,00	77,78	0,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.053.000.000,00	1.037.850.000,00	98,56	1.472.800.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	694.455.000,00	693.255.000,00	99,83	565.478.220,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	632.863.450,00	435.433.046,86	68,80	1.022.744.832,00
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	5.522.300,00	1.595.300,00	28,89	2.864.500,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	99.000.000,00	99.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	12.460.000.000,00	10.430.859.109,00	83,71	7.567.619.270,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	565.200.000,00	535.700.000,00	94,78	163.200.000,00
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	505.684.984,00	478.876.270,00	94,70	382.906.050,00
Belanja Jasa Kalibrasi	252.305.856,00	252.268.756,00	99,99	58.778.000,00
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	461.414.400,00	411.263.359,00	89,13	275.311.000,00
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	22.070.173.391,00	16.394.241.868,00	74,28	34.551.919.000,00
Belanja Jasa Operator Kapal	337.812.070,00	324.458.738,00	96,05	870.657.026,00
Belanja Tagihan Telepon	723.680.224,00	476.041.555,00	65,78	1.194.953.928,00
Belanja Tagihan Air	697.365.547,96	525.205.702,00	75,31	447.988.912,00
Belanja Tagihan Listrik	23.999.047.282,68	21.703.519.469,00	90,43	21.878.886.562,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	594.336.600,00	570.216.590,00	95,94	1.201.710.454,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.474.231.759,40	7.223.499.079,00	85,24	8.263.193.554,71
Belanja Paket/Pengiriman	922.644.444,00	900.844.244,00	97,64	688.858.372,00
Belanja Penambahan Daya	23.452.482,00	23.452.482,00	100,00	93.656.100,00
Belanja Registrasi/Keanggotaan	0,00	0,00	0,00	1.795.789,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.830.887.803,00	2.257.081.969,00	79,73	972.212.756,00
Belanja Pengolahan Air Limbah	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Medical Check Up	3.421.634.042,00	15.624.000,00	0,46	24.429.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	36.518.126.030,06	33.361.729.350,00	91,36	0,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	174.536.000,00	119.352.000,00	68,38	0,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	0,00
Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru	4.495.000.000,00	4.451.708.711,00	99,04	0,00
Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	237.173.183,54	217.159.102,00	91,56	0,00
Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	115.024.160,00	81.231.993,00	70,62	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	2.872.455.488,00	2.826.919.870,00	98,41	0,00
Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	93.957.492,00	72.357.492,00	77,01	0,00
Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	653.603.604,00	631.999.108,00	96,69	0,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	**42.956.897.643,40**	**40.903.232.169,75**	95,22	**43.336.152.424,40**
Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	11.779.054.403,00	11.764.784.000,00	99,88	10.681.242.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	8.589.420.000,00	8.509.010.000,00	99,06	8.040.235.000,00
Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	687.055.200,00	680.512.000,00	99,05	643.218.800,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.551.622.238,17	6.992.742.395,00	92,60	10.950.525.234,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	438.174.618,97	386.709.681,00	88,25	7.017.759.062,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	537.840.783,46	508.195.765,00	94,49	822.225.081,00
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	941.824.235,80	922.087.983,75	97,90	425.540.847,40
Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	4.236.059.764,00	2.983.983.145,00	70,44	4.755.406.400,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	8.195.846.400,00	8.155.207.200,00	99,50	0,00
Belanja Sewa Tanah	**165.150.000,00**	**127.150.000,00**	76,99	**12.000.000,00**
Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	120.000.000,00	115.000.000,00	95,83	0,00
Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	45.150.000,00	12.150.000,00	26,91	12.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	**34.647.250.584,30**	**33.725.341.655,00**	97,34	**45.081.309.757,00**
Belanja Sewa Excavator	50.585.000,00	50.585.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	5.000.000,00	4.773.000,00	95,46	9.500.000,00
Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	9.351.378.500,00	9.183.239.243,00	98,20	12.529.575.311,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	52.500.000,00	36.838.500,00	70,17	42.520.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	24.200.000,00	21.700.000,00	89,67	7.100.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	4.529.293.887,00	4.211.225.400,00	92,98	2.816.403.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	2.675.876.000,00	2.667.050.000,00	99,67	6.474.612.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	3.108.891.000,00	3.103.505.963,00	99,83	6.283.195.587,00
Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	1.642.828.500,00	1.610.005.130,00	98,00	2.896.409.320,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	29.760.000,00	29.760.000,00	100,00	495.255.000,00
Belanja Sewa Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	29.948.724,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.430.000,00	14.430.000,00	100,00	14.430.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	36.500.000,00	34.126.700,00	93,50	101.200.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	13.070.007.697,30	12.720.868.619,00	97,33	13.320.692.815,00
Belanja Sewa Peralatan Jaringan	54.000.000,00	37.234.100,00	68,95	56.898.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	**13.912.789.571,20**	**13.252.413.054,00**	95,25	**13.598.627.647,00**
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	3.101.521.650,00	2.974.757.900,00	95,91	2.153.848.333,00
Belanja Sewa Bangunan Gudang	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	150.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	130.925.200,00	129.788.400,00	99,13	8.700.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	361.500.000,00	339.200.000,00	93,83	212.500.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.291.042.000,00	2.280.578.000,00	99,54	1.860.844.000,00
Belanja Sewa Bangunan Parkir	8.880.000,00	8.880.000,00	100,00	8.880.000,00
Belanja Sewa Taman	15.000.000,00	14.824.600,00	98,83	16.867.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	303.341.761,20	290.350.000,00	95,72	460.244.000,00
Belanja Sewa Asrama	987.406.920,00	982.629.720,00	99,52	912.353.400,00
Belanja Sewa Hotel	6.206.815.040,00	5.751.851.434,00	92,67	768.503.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	259.757.000,00	254.553.000,00	98,00	7.045.887.914,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	**41.300.223.233,03**	**30.746.441.227,52**	74,45	**28.037.664.231,48**
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	5.643.728.500,00	3.579.866.789,47	63,43	2.448.704.990,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	6.770.702.800,00	5.790.511.647,00	85,52	11.313.827.514,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	2.317.738.839,00	1.857.924.538,62	80,16	2.955.631.795,50
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	94.682.512,00	94.682.511,60	100,00	475.252.605,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	80.000.000,00	79.493.750,00	99,37	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.763.092.320,00	1.458.704.747,00	82,74	858.708.820,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	3.488.040.914,00	2.334.178.624,00	66,92	1.257.359.160,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	0,00	0,00	0,00	9.768.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00	1.412.433.985,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	15.254.272.786,03	11.940.993.480,17	78,28	2.703.384.829,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.718.727.378,00	1.789.356.714,66	65,82	2.931.717.622,98
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	2.120.863.524,00	1.119.515.081,00	52,79	1.499.215.630,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	630.432.660,00	384.921.150,00	61,06	171.659.280,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	417.941.000,00	316.292.194,00	75,68	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	**4.587.602.500,00**	**4.287.122.350,00**	93,45	**2.128.728.322,00**
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	599.999.700,00	598.384.350,00	99,73	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	0,00	0,00	0,00	153.600.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	3.987.602.800,00	3.688.738.000,00	92,51	1.962.128.322,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.256.835,00**
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan	0,00	0,00	0,00	19.256.835,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	100,00	**240.000.000,00**
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	140.000.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	**11.407.448.818,83**	**10.470.251.480,00**	91,78	**6.375.200.551,00**
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	11.321.744.458,83	10.397.816.480,00	91,84	6.149.629.551,00
Belanja Bimbingan Teknis	9.500.000,00	3.600.000,00	37,89	0,00
Belanja Diklat Kepemimpinan	76.204.360,00	68.835.000,00	90,33	225.571.000,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	**2.314.236.555,04**	**2.305.275.643,00**	99,61	**2.985.928.261,00**
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	708.505.538,00	706.100.282,00	99,66	1.085.682.815,00
Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	620.680.919,00	620.262.230,00	99,93	937.864.536,00
Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	920.002.219,00	914.082.928,00	99,36	962.380.910,00
Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	65.047.879,04	64.830.203,00	99,67	0,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00

Tabel 7.5.59 Rincian Belanja Pemeliharaan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Pemeliharaan	**56.389.648.454,20**	**41.750.101.777,92**	**74,04**	**68.400.450.864,92**
Belanja Pemeliharaan Tanah	**2.325.695.999,00**	**2.080.412.050,00**	**89,45**	**773.550.000,00**
Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	2.325.695.999,00	2.080.412.050,00	89,45	773.550.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	**14.543.959.321,00**	**12.807.801.498,00**	**88,06**	**12.596.986.085,33**
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	47.763.600,00	38.223.600,00	80,03	20.932.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	191.880.000,00	177.000.000,00	92,25	88.200.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	290.000.350,00	183.808.670,00	63,38	1.155.295.079,33
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	26.110.000,00	23.707.000,00	90,80	39.636.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	769.741.250,00	708.284.532,00	92,02	709.680.514,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.823.085.028,00	5.348.914.828,00	91,86	4.478.654.362,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	129.285.000,00	104.848.664,00	81,10	188.390.262,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.357.598.250,00	1.350.133.200,00	99,45	1.271.207.550,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	0,00	0,00	0,00	719.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	145.870.000,00	126.051.600,00	86,41	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	242.220.000,00	227.983.500,00	94,12	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	619.761.090,00	604.757.200,00	97,58	231.809.200,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	148.967.500,00	147.777.750,00	99,20	323.524.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.064.847.423,00	2.226.987.909,00	72,66	1.975.784.872,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	294.583.330,00	264.497.000,00	89,79	53.880.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	137.000.000,00	136.854.000,00	99,89	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00	10.578.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	96.241.000,00	95.715.300,00	99,45	109.725.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	22.444.800,00	22.200.000,00	98,91	54.450.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.136.560.700,00	1.020.056.745,00	89,75	1.165.738.746,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	**20.274.976.137,20**	**12.189.625.013,00**	**60,12**	**48.582.810.058,59**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	16.642.206.905,70	9.337.335.384,55	56,11	27.099.841.896,06
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	47.065.983,99
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	99.345.259,00	99.289.631,95	99,94	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.472.828.282,50	1.430.744.750,28	97,14	168.791.820,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.012.000.000,00	487.005.586,22	48,12	21.137.510.358,54
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	272.794.680,00	235.800.000,00	86,44	129.600.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	597.949.010,00	578.159.860,00	96,69	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	177.852.000,00	21.289.800,00	11,97	0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**19.245.016.997,00**	**14.672.263.216,92**	**76,24**	**6.447.104.721,00**
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	11.350.573.923,00	9.042.462.663,00	79,67	4.016.214.400,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	80.000.000,00	79.690.200,00	99,61	1.836.309.990,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.540.000.000,00	369.187.200,00	14,53	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	3.406.123.300,00	3.406.123.300,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.311.028.774,00	1.219.120.773,44	92,99	522.480.331,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	513.446.000,00	512.167.080,48	99,75	72.100.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	43.845.000,00	43.512.000,00	99,24	0,00

Tabel 7.5.60 Rincian Belanja Perjalanan Dinas – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Perjalanan Dinas	**96.421.983.923,55**	**87.845.288.867,00**	**91,11**	**125.068.460.538,50**
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	**95.989.497.280,57**	**87.675.272.598,00**	**91,34**	**124.695.811.106,50**
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	90.747.261.095,27	83.007.114.864,00	91,47	118.247.877.151,50
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	4.752.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.976.692.888,30	3.676.654.000,00	92,46	4.227.318.300,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	426.172.495,00	295.211.874,00	69,27	761.818.723,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	834.618.802,00	696.291.860,00	83,43	1.458.796.932,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	**432.486.642,98**	**170.016.269,00**	**39,31**	**372.649.432,00**
Belanja Perjalanan Dinas Biasa– Luar Negeri	432.486.642,98	170.016.269,00	39,31	372.649.432,00

Tabel 7.5.61 Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**28.999.883.800,00**	**28.419.098.677,00**	**98,00**	**54.371.556.702,00**
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**5.042.698.800,00**	**4.987.278.977,00**	**98,90**	**6.662.560.000,00**
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.225.348.800,00	1.177.928.977,00	96,13	775.560.000,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	815.850.000,00	815.850.000,00	100,00	1.399.000.000,00
Belanja Beasiswa	2.998.500.000,00	2.993.500.000,00	99,83	4.488.000.000,00
Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**23.957.185.000,00**	**23.431.819.700,00**	**97,81**	**47.708.996.702,00**
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	16.250.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	23.957.185.000,00	23.431.819.700,00	97,81	47.692.746.702,00

Tabel 7.5.62 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Barang dan Jasa BOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.842.994.373,00**
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	**0,00**	**106.842.994.373,00**
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	106.842.994.373,00

Pada Tahun 2024, Belanja Barang dan Jasa BOS disajikan pada kode akun objek 5.1.02.88 dengan uraian akun objek Belanja Barang dan Jasa BOS berikut rincian objek beserta sub rincian objeknya. Selanjutnya pada Tahun 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana akun tersebut dimutakhirkan menjadi kode akun objek 5.1.02.89 dengan uraian akun objek Belanja Barang dan Jasa BOSP berikut rincian objek beserta sub rincian objeknya.

Tabel 7.5.63 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOSP – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Barang dan Jasa BOSP	**116.987.962.046,00**	**113.061.921.817,84**	**96,64**	**0,00**
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	**116.987.962.046,00**	**113.061.921.817,84**	**96,64**	**0,00**
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	116.108.212.046,00	113.061.921.817,84	97,38	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	879.750.000,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 7.5.64 Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Barang dan Jasa BLUD	**139.566.773.432,39**	**130.190.841.269,56**	**93,28**	**144.510.359.919,90**
Belanja Barang dan Jasa BLUD	**139.566.773.432,39**	**130.190.841.269,56**	**93,28**	**144.510.359.919,90**
Belanja Barang dan Jasa BLUD	139.566.773.432,39	130.190.841.269,56	93,28	144.510.359.919,90

Realisasi Belanja Barang dan Jasa menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.65 Realisasi Belanja Barang dan Jasa menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025– LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA BARANG DAN JASA
A	**EKONOMI**	**125.791.009.832,29**
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.338.509.388,44
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.843.062.636,92
3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	13.232.822.820,50
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.578.030.922,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17.302.844.707,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.169.437.825,00
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	39.191.098.255,29
8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	806.814.688,00
9	Dinas Perhubungan	1.946.743.687,14
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.128.188.730,00
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7.253.456.172,00
B	**KESEHATAN**	**60.995.843.111,25**
1	Dinas Kesehatan	42.446.548.329,25
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	5.492.225.716,00
3	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	8.257.290.792,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	4.799.778.274,00
C	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**4.567.227.348,00**
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	856.852.131,00
2	Biro Hukum	1.230.262.138,00
3	Dinas Sosial	331.499.253,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	2.148.613.826,00
D	**PARIWISATA**	**7.448.534.641,00**
1	Dinas Pariwisata	7.448.534.641,00
E	**PELAYANAN UMUM**	**548.278.351.822,83**
1	Badan Kepegawaian dan KORPRI	2.699.797.672,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.550.646.331,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	25.682.007.733,95
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.487.623.693,00
5	Badan Pendapatan Daerah	35.108.461.707,75
6	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	989.796.979,00
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.504.180.043,00
8	Badan Penghubung Daerah	8.464.330.331,00
9	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.629.366.133,00
10	Biro Administrasi Pimpinan	5.979.611.120,00
11	Biro Hukum	473.829.181,00
12	Biro Kesejahteraan Rakyat	27.468.767.150,00
13	Biro Organisasi	881.263.370,00
14	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.592.545.967,00
15	Biro Pengadaan Barang/Jasa	1.335.416.266,00

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA BARANG DAN JASA
16	Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.574.583.448,00
17	Biro Umum	66.190.630.811,05
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.758.328.349,00
19	Dinas Kebudayaan	2.973.440.448,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.458.566.905,00
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.556.688.094,00
22	Dinas Kesehatan	4.267.144.325,00
23	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	3.675.468.424,00
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.232.285.783,00
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.579.044.293,00
26	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.072.844.096,00
27	Dinas Pariwisata	2.716.850.199,00
28	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8.318.399.876,00
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.137.184.986,00
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2.880.958.477,00
31	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.152.058.887,00
32	Dinas Pendidikan	21.229.223.740,49
33	Dinas Perhubungan	4.079.424.736,00
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.382.665.954,00
35	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	4.351.621.390,40
36	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.767.695.141,00
37	Dinas Sosial	2.453.535.749,00
38	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.610.318.451,26
39	Inspektorat	17.544.380.447,00
40	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	21.680.956.927,00
41	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	121.761.735.011,93
42	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	5.767.954.955,00
43	Sekretariat DPRD	82.256.718.241,00
F	**PENDIDIKAN**	**234.632.060.248,19**
1	Dinas Kebudayaan	1.275.021.726,31
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7.723.635.440,00
3	Dinas Pendidikan	224.064.258.629,88
4	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	1.569.144.452,00
G	**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**	**2.597.418.323,00**
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.494.929.017,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.102.489.306,00
H	**PERLINDUNGAN SOSIAL**	**9.638.232.055,00**
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4.265.548.056,00
2	Dinas Sosial	5.322.385.859,00
3	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	50.298.140,00
I	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**167.972.562.777,82**

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA BARANG DAN JASA
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	924.323.021,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	167.048.239.756,82
	JUMLAH	**1.161.921.240.159,38**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa per masing-masing OPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.66 Realisasi Belanja Barang dan Jasa per masing-masing OPD Tahun 2025– LRA

NO	OPD	NILAI BELANJA BARANG DAN JASA
1	Badan Kepegawaian dan KORPRI	2.699.797.672,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.550.646.331,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	25.682.007.733,95
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.344.475.824,00
5	Badan Pendapatan Daerah	35.108.461.707,75
6	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	989.796.979,00
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.504.180.043,00
8	Badan Penghubung Daerah	8.464.330.331,00
9	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.629.366.133,00
10	Biro Administrasi Pimpinan	5.979.611.120,00
11	Biro Hukum	1.704.091.319,00
12	Biro Kesejahteraan Rakyat	27.468.767.150,00
13	Biro Organisasi	881.263.370,00
14	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.592.545.967,00
15	Biro Pengadaan Barang/Jasa	1.335.416.266,00
16	Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.574.583.448,00
17	Biro Umum	66.190.630.811,05
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.096.837.737,44
19	Dinas Kebudayaan	4.248.462.174,31
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	16.301.629.541,92
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	11.280.323.534,00
22	Dinas Kesehatan	46.713.692.654,25
23	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	16.908.291.244,50
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.810.316.705,00
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	19.881.889.000,00
26	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.737.210.938,00
27	Dinas Pariwisata	10.165.384.840,00
28	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	49.536.310.458,29
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.137.184.986,00
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	12.638.732.249,00
31	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.958.873.575,00

NO	OPD	NILAI BELANJA BARANG DAN JASA
32	Dinas Pendidikan	245.293.482.370,37
33	Dinas Perhubungan	6.026.168.423,14
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.510.854.684,00
35	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	5.920.765.842,40
36	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	172.815.934.897,82
37	Dinas Sosial	8.107.420.861,00
38	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	9.914.072.763,26
39	Inspektorat	17.544.380.447,00
40	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	29.938.247.719,00
41	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	126.561.513.285,93
42	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	7.916.568.781,00
43	Sekretariat DPRD	82.256.718.241,00
	JUMLAH	**1.161.921.240.159,38**

7.5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Belanja Bunga	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	**0,00**

Belanja bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman yang diterima Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak terdapat penganggaran Belanja Bunga.

Tabel 7.5.67 Belanja Bunga – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Bunga	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.692.560.273,00**
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.692.560.273,00**
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	0,00	0,00	0,00	3.692.560.273,00

7.5.1.2.1.4 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	2.864.494.061,38	**834.852.991,00**

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja Subsidi ditujukan untuk memberikan keringanan modal usaha berupa subsidi margin bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau melalui Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan PT. Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) tentang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Subsidi Margin yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor 120.23/KDH.118/KB-02/2024 dan Nomor 027/MOU/2024 atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 120.2/4590/DKUKM/2024 dan Nomor 135/PKS/2024 yang diperbaharui dengan Perubahan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 000.4.7.2/607/DKUKM/2025 dan Nomor 010/PKS/2025. Teknis pelaksanaan Belanja Subdisi berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Subsidi Bunga Pinjaman bagi Usaha Mikro dan Industri Kecil.

Pada tahun 2025 Belanja Subsidi terealisasi sebesar Rp834.852.991,00 atau sebesar 29,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.864.494.061,38 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Tidak tercapainya target belanja dikarenakan replikasi Program Subsidi Margin 0% bagi UMKM oleh Pemerintah Kota Batam, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Bintan turut berpengaruh terhadap tingkat pemanfaatan program di tingkat Provinsi. Dengan adanya program sejenis di tingkat kabupaten/kota, UMKM memiliki lebih banyak alternatif untuk memperoleh pembiayaan dengan skema subsidi margin yang relatif sama. Dalam kondisi tersebut, pelaku UMKM cenderung memilih program yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dari sisi kemudahan persyaratan, kecepatan proses, besaran pinjaman, jangka waktu, maupun kedekatan lokasi layanan. Hal ini menyebabkan sebagian UMKM yang menjadi target sasaran program provinsi beralih memanfaatkan program yang disediakan oleh pemerintah daerahnya masing-masing, sehingga permintaan terhadap subsidi margin yang bersumber dari APBD Provinsi menjadi lebih rendah dari yang telah diproyeksikan.

Tabel 7.5.68 Belanja Subsidi – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Subsidi	**2.864.494.061,38**	**834.852.991,00**	**29,14**	**944.301.180,00**
Belanja Subsidi kepada BUMD	**2.864.494.061,38**	**834.852.991,00**	**29,14**	**944.301.180,00**
Belanja Subsidi kepada BUMD	2.864.494.061,38	834.852.991,00	29,14	944.301.180,00

Realisasi Belanja Subsidi menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.69 Realisasi Belanja Subsidi menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA SUBSIDI
A	**EKONOMI**	**834.852.991,00**
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	834.852.991,00

7.5.1.2.1.5 Belanja Hibah

Belanja Hibah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	174.868.035.279,01	**165.767.273.907,96**

Belanja Hibah diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2025 Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp165.767.273.907,96 atau sebesar 94,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp174.868.035.279,01. Rincian Belanja Hibah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.70 Belanja Hibah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Hibah	**174.868.035.279,01**	**165.767.273.907,96**	**94,80**	**357.581.329.209,27**
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	**24.891.916.495,00**	**19.752.937.062,67**	**79,35**	**158.511.792.275,00**
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	**4.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**100,00**	**147.213.011.075,00**
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	147.213.011.075,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	**20.891.916.495,00**	**15.752.937.062,67**	**75,40**	**11.298.781.200,00**
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	20.891.916.495,00	15.752.937.062,67	75,40	11.298.781.200,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	**105.921.148.784,01**	**102.242.047.979,29**	**96,53**	**157.544.331.693,27**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	**27.549.435.800,00**	**27.146.607.739,00**	**98,54**	**23.132.519.267,00**
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	17.090.000.000,00	16.903.187.450,00	98,91	22.923.400.067,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.459.435.800,00	10.243.420.289,00	97,93	209.119.200,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	**50.409.393.800,00**	**47.939.194.434,00**	**95,10**	**105.107.423.869,09**
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	44.809.939.300,00	42.340.019.950,00	94,49	99.743.800.012,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.599.454.500,00	5.599.174.484,00	99,99	5.363.623.857,09
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	**27.012.319.184,01**	**26.206.245.806,29**	**97,02**	**29.134.388.557,18**
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.498.300.000,00	2.278.300.000,00	91,19	7.836.500.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	24.514.019.184,01	23.927.945.806,29	97,61	21.297.888.557,18
Belanja Hibah kepada Koperasi	**950.000.000,00**	**950.000.000,00**	**100,00**	**170.000.000,00**
Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	950.000.000,00	950.000.000,00	100,00	170.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS	**38.935.740.000,00**	**38.653.058.866,00**	**99,27**	**36.870.020.909,00**
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	**33.995.640.000,00**	**33.716.349.341,00**	**99,18**	**32.930.722.526,00**
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	33.995.640.000,00	33.716.349.341,00	99,18	32.930.722.526,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	**4.940.100.000,00**	**4.936.709.525,00**	**99,93**	**3.939.298.383,00**
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	4.940.100.000,00	4.936.709.525,00	99,93	3.939.298.383,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	**5.119.230.000,00**	**5.119.230.000,00**	**100,00**	**4.655.184.332,00**
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	**5.119.230.000,00**	**5.119.230.000,00**	**100,00**	**4.655.184.332,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.119.230.000,00	5.119.230.000,00	100,00	4.655.184.332,00

Penerima hibah yang dijelaskan pada tabel diatas terdiri dari pemberian hibah dana BOS Tahun Anggaran 2025 senilai Rp38.653.058.866,00 pada satuan pendidikan, pemberian hibah berupa uang senilai Rp110.243.796.266,00 oleh 11 (sebelas) perangkat daerah, dan pemberian hibah berupa barang senilai Rp55.523.477.641,96 oleh 8 (delapan) perangkat daerah. Selanjutnya, rekapitulasi penerima hibah dana BOS Tahun Anggaran 2025 dan penerima hibah berupa uang ditunjukkan pada **Lampiran 2**.

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada tahun 2025 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Pada tahun 2025 Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik terealisasi sebesar Rp5.119.230.000,00 atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan di APBD sebesar Rp5.119.230.000,00. Adapun Rincian Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.71 Belanja Hibah Bantuan Keuangan – LRA

NO	U R A I A N	JUMLAH
1	Bantuan Keuangan Kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (DPD Gerindra) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	880.830.000,00
2	Bantuan Keuangan Kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (DPD Golkar) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	774.530.000,00
3	Bantuan Keuangan Kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat (DPW NasDem) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	748.905.000,00
4	Bantuan Keuangan Kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	587.725.000,00
5	Bantuan Keuangan Kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	572.410.000,00
6	Bantuan Keuangan Kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD DEMOKRAT) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	402.990.000,00
7	Bantuan Keuangan Kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	333.615.000,00
8	Bantuan Keuangan Kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	316.970.000,00
9	Bantuan Keuangan Kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	174.970.000,00
10	Bantuan Keuangan Kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (DPD HANURA) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	174.470.000,00
11	Bantuan Keuangan Kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW PERINDO) di DPRD Provinsi Kepulauan Riau	151.815.000,00
	JUMLAH	**5.119.230.000,00**

Realisasi Belanja Hibah menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.72 Realisasi Belanja Hibah menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA HIBAH
A	**EKONOMI**	**19.867.530.784,96**
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.716.413.135,00
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	560.000.000,00
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.760.000.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	90.000.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8.816.317.649,96
6	Dinas Perhubungan	924.800.000,00
B	**KESEHATAN**	**2.274.092.020,00**
1	Dinas Kesehatan	2.274.092.020,00
C	**PELAYANAN UMUM**	**82.505.283.063,00**
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.570.930.000,00
2	Biro Kesejahteraan Rakyat	44.560.156.275,00
3	Biro Umum	18.249.196.788,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80.000.000,00
5	Dinas Pendidikan	45.000.000,00
D	**PENDIDIKAN**	**60.665.368.040,00**
1	Dinas Kebudayaan	1.500.000.000,00
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10.753.324.685,00
3	Dinas Pendidikan	48.412.043.355,00
E	**PERLINDUNGAN SOSIAL**	**455.000.000,00**
1	Dinas Sosial	455.000.000,00
	JUMLAH	**165.767.273.907,96**

Realisasi Belanja Hibah per masing-masing OPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.73 Realisasi Belanja Hibah per masing-masing OPD Tahun 2025 – LRA

NO	OPD	NILAI BELANJA HIBAH
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.570.930.000,00
2	Biro Kesejahteraan Rakyat	44.560.156.275,00
3	Biro Umum	18.249.196.788,00
4	Dinas Kebudayaan	1.500.000.000,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.716.413.135,00
6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10.753.324.685,00
7	Dinas Kesehatan	2.274.092.020,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	560.000.000,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.760.000.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	90.000.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8.816.317.649,96

NO	OPD	NILAI BELANJA HIBAH
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80.000.000,00
13	Dinas Pendidikan	48.457.043.355,00
14	Dinas Perhubungan	924.800.000,00
15	Dinas Sosial	455.000.000,00
	JUMLAH	**165.767.273.907,96**

7.5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	2.856.445.000,00	**1.834.940.000,00**

Belanja Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pada tahun 2025 Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp1.834.940.000,00 atau sebesar 64,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.856.445.000,00. Tidak tercapainya target belanja dikarenakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan verifikasi kembali terhadap sasaran penerima bantuan sosial untuk menghindari terjadinya duplikasi penerima bantuan dana dengan jenis, peruntukan dan tujuan yang sama dengan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota sebelumnya, hal ini dilakukan dalam rangka pengendalian penyaluran bantuan sosial. Berikut dibawah ini adalah rincian tabel belanja bantuan sosial:

Tabel 7.5.74 Belanja Bantuan Sosial – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Bantuan Sosial	**2.856.445.000,00**	**1.834.940.000,00**	**64,24**	**4.002.925.000,00**
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	**0,00**	**2.972.600.000,00**
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	2.972.600.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	**2.856.445.000,00**	**1.834.940.000,00**	**64,24**	**910.325.000,00**
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.856.445.000,00	1.834.940.000,00	64,24	776.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	134.325.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	**0,00**	**120.000.000,00**
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00

Pada tahun 2025 Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Sosial digunakan antara lain:

1. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp321.000.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 184 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Sosial berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
2. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp551.500.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1088 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 184 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Sosial berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
3. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp125.000.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Sosial berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
4. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp335.000.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1116 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Sosial dalam Rangka Penanganan Bencana Kebakaran di Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Tahun 2025.
5. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp168.240.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1125 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Sosial dalam Rangka Penanganan Bencana Puting Beliung di Kota Tanjungpinang Tahun 2024.
6. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp334.200.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1124 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Sosial dalam Rangka Penanganan Bencana Puting Beliung di Kota Batam Tahun 2024.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.75 Realisasi Belanja Bantuan Sosial menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA BANTUAN SOSIAL
A	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**837.440.000,00**

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA BANTUAN SOSIAL
	Dinas Sosial	837.440.000,00
B	**PERLINDUNGAN SOSIAL**	**997.500.000,00**
	Dinas Sosial	997.500.000,00
	JUMLAH	**1.834.940.000,00**

7.5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	269.313.511.475,33	**232.159.877.710,16**

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Pada tahun 2025 Belanja Modal yang terealisasi adalah sebesar Rp232.159.877.710,16 atau 86,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp269.313.511.475,33 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.76 Belanja Modal – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
BELANJA MODAL	**269.313.511.475,33**	**232.159.877.710,16**	**86,20**	**307.344.075.589,86**
Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	992.100.000,00	99,21	920.100.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.735.653.121,33	81.499.424.632,00	91,85	115.508.155.838,84
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.492.416.281,00	80.799.961.394,06	85,51	129.103.961.833,55
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.989.061.381,00	46.310.371.998,10	74,71	36.791.762.576,47
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.970.627.692,00	21.957.775.186,00	99,94	19.630.419.447,00
Belanja Modal Aset Lainnya	1.125.753.000,00	600.244.500,00	53,32	5.389.675.894,00

7.5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.000.000.000,00	**992.100.000,00**

Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah,

pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Pada tahun 2025 Belanja Modal Tanah yang terealisasi sebesar Rp992.100.000,00 atau 99,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Berikut dibawah ini adalah rincian tabel Belanja Modal Tanah:

Tabel 7.5.77 Belanja Modal Tanah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Tanah	**1.000.000.000,00**	**992.100.000,00**	**99,21**	**920.100.000,00**
Belanja Modal Tanah Persil	**1.000.000.000,00**	**992.100.000,00**	**99,21**	**920.100.000,00**
Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.000.000.000,00	992.100.000,00	99,21	920.100.000,00

Realisasi Belanja Modal Tanah menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.78 Realisasi Belanja Modal Tanah menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA MODAL TANAH
A	**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**	**992.100.000,00**
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	992.100.000,00

7.5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	88.735.653.121,33	**81.499.424.632,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. Pada tahun 2025 Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp81.499.424.632,00 atau sebesar 91,85%, dari yang dianggarkan sebesar Rp88.735.653.121,33. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.79 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**88.735.653.121,33**	**81.499.424.632,00**	**91,85**	**115.508.155.838,84**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Besar	60.473.770,00	53.759.700,00	88,90	605.244.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	9.755.836.100,00	8.834.340.156,00	90,55	15.316.607.100,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	357.114.700,00	349.880.500,00	97,97	184.490.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	105.482.100,00	104.523.717,00	99,09	1.284.714.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.906.361.166,40	14.562.747.870,00	86,14	21.725.083.804,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.553.827.517,00	2.462.508.590,00	96,42	1.048.602.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	17.136.583.850,00	16.467.952.700,00	96,10	8.387.907.829,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	1.934.156.247,00	609.709.210,00	31,52	14.828.330.827,00
Belanja Modal Komputer	7.927.147.821,72	6.485.404.736,00	81,81	11.261.084.800,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	3.774.000,00	0,00	0,00	29.100.000,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1.585.000.000,00	1.565.000.000,00	98,74	0,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	51.106.200,00	51.012.000,00	99,82	17.433.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	492.318.004,00	3.885.000,00	0,79	1.783.806.844,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	109.928.200,60	12.093.000,00	11,00	23.680.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	31.371.598.359,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	28.803.403.745,00	29.066.128.626,00	100,91	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	953.139.699,61	870.478.827,00	91,33	7.640.473.275,84

Adapun rincian Belanja Modal Peralatan Mesin adalah sebagai berikut :

Tabel 7.5.80 Rincian Belanja Modal Alat Besar – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Besar	**60.473.770,00**	**53.759.700,00**	**88,90**	**605.244.000,00**
Belanja Modal Alat Bantu	**60.473.770,00**	**53.759.700,00**	**88,90**	**605.244.000,00**
Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	598.500.000,00
Belanja Modal Pompa	60.473.770,00	53.759.700,00	88,90	6.744.000,00

Tabel 7.5.81 Rincian Belanja Modal Alat Modal Angkutan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Angkutan	**9.755.836.100,00**	**8.834.340.156,00**	**90,55**	**15.316.607.100,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	**5.928.766.100,00**	**5.027.770.156,00**	**84,80**	**15.316.607.100,00**
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.615.100.000,00	1.615.100.000,00	100,00	4.192.800.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.128.875.900,00	2.982.106.756,00	95,31	9.851.257.100,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.002.443.200,00	335.614.000,00	33,48	1.159.450.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	182.347.000,00	94.949.400,00	52,07	113.100.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	**3.827.070.000,00**	**3.806.570.000,00**	**99,46**	**0,00**
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	1.230.000.000,00	1.209.500.000,00	98,33	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	2.597.070.000,00	2.597.070.000,00	100,00	0,00

Tabel 7.5.82 Rincian Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	**357.114.700,00**	**349.880.500,00**	**97,97**	**184.490.000,00**
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	**347.461.300,00**	**340.728.500,00**	**98,06**	**0,00**
Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	3.570.800,00	2.553.000,00	71,50	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	343.890.500,00	338.175.500,00	98,34	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	**1.873.400,00**	**1.650.000,00**	**88,08**	**16.800.000,00**
Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	1.873.400,00	1.650.000,00	88,08	0,00
Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00
Belanja Modal Alat Ukur	**7.780.000,00**	**7.502.000,00**	**96,43**	**167.690.000,00**
Belanja Modal Alat Ukur Universal	7.780.000,00	7.502.000,00	96,43	156.590.000,00
Belanja Modal Alat Kalibrasi	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00

Tabel 7.5.83 Rincian Belanja Modal Alat Pertanian – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Pertanian	**105.482.100,00**	**104.523.717,00**	99,09	**1.284.714.000,00**
Belanja Modal Alat Pengolahan	**105.482.100,00**	**104.523.717,00**	99,09	**1.284.714.000,00**
Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	55.030.000,00
Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	8.240.900,00	8.218.700,00	99,73	29.290.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.049.572.000,00
Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	97.241.200,00	96.305.017,00	99,04	150.822.000,00

Tabel 7.5.84 Rincian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	**16.906.361.166,40**	**14.562.747.870,00**	**86,14**	**21.725.083.804,00**
Belanja Modal Alat Kantor	**1.567.331.495,00**	**1.084.099.845,00**	**69,17**	**1.888.000.694,00**
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	440.100.090,00	319.047.345,00	72,49	598.220.695,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.127.231.405,00	765.052.500,00	67,87	1.289.779.999,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	**14.216.443.497,40**	**12.409.373.114,00**	**87,29**	**17.289.622.022,00**
Belanja Modal Mebel	5.919.174.108,00	5.110.722.878,00	86,34	14.946.007.224,00
Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	45.545.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	5.900.845.439,90	5.307.111.441,00	89,94	788.585.200,00
Belanja Modal Alat Dapur	117.350.083,00	10.864.300,00	9,26	21.285.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.232.998.966,50	1.936.075.496,00	86,70	1.477.873.998,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	46.074.900,00	44.598.999,00	96,80	10.325.600,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	**1.122.586.174,00**	**1.069.274.911,00**	**95,25**	**2.547.461.088,00**
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	100.467.444,00	97.738.760,00	97,28	167.482.059,00
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	198.882.009,00	167.468.900,00	84,21	54.202.000,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	240.091.609,00	237.835.450,00	99,06	126.693.159,00
Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	19.680.000,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	583.145.112,00	566.231.801,00	97,10	2.179.403.870,00

Tabel 7.5.85 Rincian Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	**2.553.827.517,00**	**2.462.508.590,00**	**96,42**	**1.048.602.000,00**
Belanja Modal Alat Studio	**2.510.963.446,00**	**2.423.531.150,00**	**96,52**	**842.013.000,00**
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.624.015.996,00	1.611.712.200,00	99,24	492.338.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	581.552.450,00	506.524.550,00	87,10	349.675.000,00
Belanja Modal Peralatan Cetak	34.000.000,00	33.966.000,00	99,90	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	271.395.000,00	271.328.400,00	99,98	0,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	**38.206.571,00**	**34.703.940,00**	**90,83**	**42.399.000,00**
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	38.206.571,00	34.703.940,00	90,83	42.399.000,00
Belanja Modal Peralatan Pemancar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.690.000,00**
Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	56.690.000,00
Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	**4.657.500,00**	**4.273.500,00**	**91,76**	**107.500.000,00**
Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	4.657.500,00	4.273.500,00	91,76	107.500.000,00

Tabel 7.5.86 Rincian Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	**17.136.583.850,00**	**16.467.952.700,00**	**96,10**	**8.387.907.829,00**
Belanja Modal Alat Kedokteran	**17.068.085.850,00**	**16.399.454.700,00**	**96,08**	**4.009.508.582,00**
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	13.561.863.700,00	12.919.154.700,00	95,26	1.593.398.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	210.000.000,00	210.000.000,00	100,00	3.200.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0,00	0,00	0,00	26.094.082,00
Belanja Modal Alat Kedokteran THT	0,00	0,00	0,00	126.816.500,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	0,00	0,00	0,00	769.750.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa	0,00	0,00	0,00	1.490.250.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.296.222.150,00	3.270.300.000,00	99,21	0,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	**68.498.000,00**	**68.498.000,00**	**100,00**	**4.378.399.247,00**
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	68.498.000,00	68.498.000,00	100,00	4.378.399.247,00

Tabel 7.5.87 Rincian Belanja Modal Alat Laboratorium – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Laboratorium	**1.934.156.247,00**	**609.709.210,00**	**31,52**	**14.828.330.827,00**
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	**568.586.450,00**	**497.335.500,00**	**87,47**	**1.539.107.500,00**
Belanja Modal Alat Laboratorium Cocok Tanam	0,00	0,00	0,00	838.630.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	70.000.000,00	69.652.500,00	99,50	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	424.000.000,00	419.580.000,00	98,96	700.477.500,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	74.586.450,00	8.103.000,00	10,86	0,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	**167.850.737,00**	**105.073.710,00**	**62,60**	**0,00**
Belanja Modal Analytical Instrument	98.860.600,00	92.940.300,00	94,01	0,00
Belanja Modal Instrument Probe/Sensor	55.890.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Glassware Plastic/Utensils	9.956.537,00	9.552.660,00	95,94	0,00
Belanja Modal Laboratory Safety Equipment	3.143.600,00	2.580.750,00	82,10	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	**1.190.070.050,00**	**0,00**	**0,00**	**13.202.373.327,00**
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika	731.250,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	340.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	1.186.148.800,00	0,00	0,00	13.202.373.327,00
Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	**7.649.010,00**	**7.300.000,00**	**95,44**	**86.850.000,00**
Belanja Modal System/Power Supply	7.649.010,00	7.300.000,00	95,44	86.850.000,00

Tabel 7.5.88 Rincian Belanja Modal Komputer – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Komputer	**7.927.147.821,72**	**6.485.404.736,00**	**81,81**	**11.261.084.800,00**
Belanja Modal Komputer Unit	**6.295.245.682,00**	**5.131.128.340,00**	**81,51**	**8.245.543.400,00**
Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	169.128.000,00
Belanja Modal Personal Computer	5.930.575.232,00	4.807.337.340,00	81,06	7.617.308.400,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	364.670.450,00	323.791.000,00	88,79	459.107.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	**1.631.902.139,72**	**1.354.276.396,00**	**82,99**	**3.015.541.400,00**
Belanja Modal Peralatan Mini Computer	202.869.176,00	196.101.798,00	96,66	151.724.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.023.785.840,00	797.550.948,00	77,90	1.503.823.400,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	200.230.556,72	176.647.400,00	88,22	155.534.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	205.016.567,00	183.976.250,00	89,74	1.204.460.000,00

Tabel 7.5.89 Rincian Belanja Modal Alat Eksplorasi – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Eksplorasi	**3.774.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.100.000,00**
Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	**3.774.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.100.000,00**
Belanja Modal Elektronik/Electric	3.774.000,00	0,00	0,00	29.100.000,00

Tabel 7.5.90 Rincian Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	**1.585.000.000,00**	**1.565.000.000,00**	**98,74**	**0,00**
Belanja Modal Sumur	**1.585.000.000,00**	**1.565.000.000,00**	**98,74**	**0,00**
Belanja Modal Sumur Lainnya	1.585.000.000,00	1.565.000.000,00	98,74	0,00

Tabel 7.5.91 Rincian Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	**51.106.200,00**	**51.012.000,00**	**99,82**	**17.433.000,00**
Belanja Modal Alat Pelindung	**51.106.200,00**	**51.012.000,00**	**99,82**	**17.433.000,00**
Belanja Modal Baju Pengaman	51.106.200,00	51.012.000,00	99,82	12.675.000,00
Belanja Modal Sepatu Lapangan	0,00	0,00	0,00	4.270.000,00
Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0,00	0,00	0,00	488.000,00

Tabel 7.5.92 Rincian Belanja Modal Rambu – rambu – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Rambu-Rambu	**492.318.004,00**	**3.885.000,00**	**0,79**	**1.783.806.844,00**
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	**492.318.004,00**	**3.885.000,00**	**0,79**	**1.783.806.844,00**
Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	492.318.004,00	3.885.000,00	0,79	1.783.806.844,00

Tabel 7.5.93 Rincian Belanja Modal Peralatan Olahraga – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Peralatan Olahraga	**109.928.200,60**	**12.093.000,00**	**11,00**	**23.680.000,00**
Belanja Modal Peralatan Olahraga	**109.928.200,60**	**12.093.000,00**	**11,00**	**23.680.000,00**
Belanja Modal Peralatan Permainan	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	104.828.200,60	6.993.000,00	6,67	23.680.000,00

Tabel 7.5.94 Rincian Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOS – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.371.598.359,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.371.598.359,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	31.371.598.359,00

Pada Tahun 2024, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS disajikan pada kode akun objek 5.2.02.88 dengan uraian akun objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS berikut rincian objek beserta sub rincian objeknya. Selanjutnya pada Tahun 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana akun tersebut dimutakhirkan menjadi kode akun objek 5.2.02.89 dengan uraian akun objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP berikut rincian objek beserta sub rincian objeknya.

Tabel 7.5.95 Rincian Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOSP – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	**28.803.403.745,00**	**29.066.128.626,00**	**100,91**	**0,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	**28.803.403.745,00**	**29.066.128.626,00**	**100,91**	**0,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	28.803.403.745,00	29.066.128.626,00	100,91	0,00

Pada tahun 2025 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP terealisasi sebesar Rp29.066.128.626,00 atau sebesar 100,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.803.403.745,00. Pelampauan realisasi ini disebabkan oleh adanya penyesuaian pergeseran alokasi pada Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang secara ketentuan teknis dari Pemerintah Pusat dapat dilakukan oleh satuan pendidikan. Melalui mekanisme tersebut, anggaran yang semula dialokasikan pada pos Belanja Barang dan Jasa dialihkan ke pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk mengakomodasi kebutuhan riil pengadaan aset tetap di sekolah. Namun, batasan waktu penetapan Perubahan APBD (APBD-P) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah disahkan sehingga membuat pergeseran antarjenis belanja ini tidak tertampung kedalam APBD-P.

Tabel 7.5.96 Rincian Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	**953.139.699,61**	**870.478.827,00**	**91,33**	**7.640.473.275,84**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	**953.139.699,61**	**870.478.827,00**	**91,33**	**7.640.473.275,84**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	953.139.699,61	870.478.827,00	91,33	7.640.473.275,84

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.97 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
A	**EKONOMI**	**2.098.076.295,00**
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	177.106.415,00
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	65.784.880,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	113.973.000,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25.363.102,00
5	Dinas Perhubungan	33.666.520,00
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	981.210.929,00
7	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	700.971.449,00
B	**KESEHATAN**	**19.275.065.360,00**
1	Dinas Kesehatan	295.923.200,00
2	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	15.008.991.800,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	3.970.150.360,00
C	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**127.336.899,00**
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	44.721.999,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	82.614.900,00
D	**PELAYANAN UMUM**	**27.397.979.372,00**
1	Badan Kepegawaian dan KORPRI	344.076.997,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.320.445.701,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	998.620.070,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.941.500,00
5	Badan Pendapatan Daerah	1.401.871.119,00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.128.377.850,00
7	Badan Penghubung Daerah	501.417.940,00
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	63.825.000,00
9	Biro Administrasi Pimpinan	20.442.594,00
10	Biro Hukum	62.472.550,00
11	Biro Kesejahteraan Rakyat	60.051.000,00
12	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.390.000,00
13	Biro Pengadaan Barang/Jasa	21.983.550,00
14	Biro Perekonomian dan Pembangunan	4.384.500,00
15	Biro Umum	6.250.926.144,00

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
16	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	83.534.300,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	175.038.436,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	155.980.000,00
19	Dinas Kesehatan	26.697.499,00
20	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	626.630.761,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	121.424.999,00
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	44.938.001,00
23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	339.838.400,00
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	277.315.351,00
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.576.000,00
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	120.397.200,00
27	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3.030.300,00
28	Dinas Pendidikan	1.008.241.327,00
29	Dinas Perhubungan	39.392.000,00
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	289.835.500,00
31	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	44.222.200,00
32	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.800.833.712,00
33	Dinas Sosial	320.889.570,00
34	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	581.157.451,00
35	Inspektorat	830.963.057,00
36	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	239.862.000,00
37	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	4.811.753.693,00
38	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	287.218.100,00
39	Sekretariat DPRD	2.967.983.000,00
E	**PENDIDIKAN**	**32.186.796.156,00**
	Dinas Pendidikan	32.186.796.156,00
F	**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**	**128.855.460,00**
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	128.855.460,00
G	**PERLINDUNGAN SOSIAL**	**202.315.090,00**
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	202.315.090,00
H	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**83.000.000,00**
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	83.000.000,00
	JUMLAH	**81.499.424.632,00**

Realisai Belanja Modal Peralatan dan Mesin per masing-masing OPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.98 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per masing-masing OPD Tahun 2025 – LRA

NO	OPD	NILAI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
1	Badan Kepegawaian dan KORPRI	344.076.997,00

NO	OPD	NILAI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.320.445.701,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	998.620.070,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	47.663.499,00
5	Badan Pendapatan Daerah	1.401.871.119,00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.128.377.850,00
7	Badan Penghubung Daerah	501.417.940,00
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	63.825.000,00
9	Biro Administrasi Pimpinan	20.442.594,00
10	Biro Hukum	62.472.550,00
11	Biro Kesejahteraan Rakyat	60.051.000,00
12	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.390.000,00
13	Biro Pengadaan Barang/Jasa	21.983.550,00
14	Biro Perekonomian dan Pembangunan	4.384.500,00
15	Biro Umum	6.250.926.144,00
16	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	83.534.300,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	352.144.851,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	155.980.000,00
19	Dinas Kesehatan	322.620.699,00
20	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	692.415.641,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	235.397.999,00
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	70.301.103,00
23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	468.693.860,00
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	360.315.351,00
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.576.000,00
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	322.712.290,00
27	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3.030.300,00
28	Dinas Pendidikan	33.195.037.483,00
29	Dinas Perhubungan	73.058.520,00
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.271.046.429,00
31	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	44.222.200,00
32	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.800.833.712,00
33	Dinas Sosial	320.889.570,00
34	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.282.128.900,00
35	Inspektorat	830.963.057,00
36	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	15.248.853.800,00
37	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	8.781.904.053,00
38	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	369.833.000,00
39	Sekretariat DPRD	2.967.983.000,00
	JUMLAH	**81.499.424.632,00**

7.5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	94.492.416.281,00	**80.799.961.394,06**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Pada tahun 2025 Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp80.799.961.394,06 atau sebesar 85,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp94.492.416.281,00. Tidak tercapainya realisasi belanja dari target yang ditetapkan disebabkan tunda bayar tahun anggaran 2025. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**94.492.416.281,00**	**80.799.961.394,06**	**85,51**	**129.103.961.833,55**
Belanja Modal Bangunan Gedung	93.855.273.265,00	80.350.990.378,67	85,61	121.174.100.425,55
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	637.143.016,00	448.971.015,39	70,47	7.929.861.408,00

Dengan rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 7.5.100 Rincian Belanja Modal Bangunan Gedung – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Bangunan Gedung	**93.855.273.265,00**	**80.350.990.378,67**	**85,61**	**121.174.100.425,55**
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	**93.855.273.265,00**	**80.350.990.378,67**	**85,61**	**121.174.100.425,55**
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	66.670.256.265,00	61.482.475.167,96	92,22	15.684.793.716,97
Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	198.225.144,00	198.225.143,28	100,00	436.463.094,60
Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00	599.183.122,00
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	173.300.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	219.280.700,00	219.280.700,00	100,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	199.866.000,00	199.866.000,00	100,00	10.239.897.000,00

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	20.408.212.850,00	14.711.593.224,66	72,09	70.519.118.631,22
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	437.431.805,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00	2.952.107.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	300.000.000,00	298.528.000,00	99,51	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	5.859.432.306,00	3.241.022.142,77	55,31	8.933.287.246,76
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	199.659.809,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.998.859.000,00

Tabel 7.5.101 Rincian Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	**637.143.016,00**	**448.971.015,39**	**70,47**	**7.929.861.408,00**
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	**637.143.016,00**	**448.971.015,39**	**70,47**	**7.929.861.408,00**
Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00	0,00	0,00	124.800.000,00
Belanja Modal Pagar	637.143.016,00	448.971.015,39	70,47	7.805.061.408,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.102 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025– LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
A	**EKONOMI**	**3.937.641.286,05**
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	198.225.143,28
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	498.394.000,00
3	Dinas Perhubungan	3.241.022.142,77
B	**KESEHATAN**	**50.842.855.230,00**
1	Dinas Kesehatan	17.901.215.230,00
2	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	32.941.640.000,00
C	**PELAYANAN UMUM**	**1.576.979.393,00**
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.900.000,00
2	Dinas Pendidikan	1.138.139.693,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	418.939.700,00
D	**PENDIDIKAN**	**21.112.326.485,01**
1	Dinas Pendidikan	21.112.326.485,01

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
E	**PERLINDUNGAN SOSIAL**	**3.330.159.000,00**
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	3.330.159.000,00
	JUMLAH	**80.799.961.394,06**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per masing-masing OPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.103 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per masing-masing OPD Tahun 2025– LRA

NO	OPD	NILAI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.900.000,00
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	198.225.143,28
3	Dinas Kesehatan	17.901.215.230,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	498.394.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	3.330.159.000,00
6	Dinas Pendidikan	22.250.466.178,01
7	Dinas Perhubungan	3.241.022.142,77
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	418.939.700,00
9	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	32.941.640.000,00
	JUMLAH	**80.799.961.394,06**

7.5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	61.989.061.381,00	**46.310.371.998,10**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Pada tahun 2025 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar terealisasi sebesar Rp46.310.371.998,10 atau sebesar 74,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp61.989.061.381,00. Tidak tercapainya realisasi belanja dari target yang ditetapkan disebabkan tunda bayar tahun anggaran 2025. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.104 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**61.989.061.381,00**	**46.310.371.998,10**	**74,71**	**36.791.762.576,47**
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	25.363.855.040,00	19.166.853.257,69	75,57	32.288.532.170,00
Belanja Modal Bangunan Air	2.738.054.230,00	1.658.836.030,00	60,58	1.149.877.370,00
Belanja Modal Instalasi	28.000.487.131,00	20.552.263.179,00	73,40	483.000.000,00
Belanja Modal Jaringan	5.886.664.980,00	4.932.419.531,41	83,79	2.870.353.036,47

Dengan rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Tabel 7.5.105 Rincian Belanja Modal Jalan dan Jembatan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	**25.363.855.040,00**	**19.166.853.257,69**	**75,57**	**32.288.532.170,00**
Belanja Modal Jalan	**9.901.975.300,00**	**6.934.882.414,00**	**70,04**	**32.007.864.420,00**
Belanja Modal Jalan Provinsi	9.901.975.300,00	6.934.882.414,00	70,04	31.860.375.400,00
Belanja Modal Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	147.489.020,00
Belanja Modal Jembatan	**15.461.879.740,00**	**12.231.970.843,69**	**79,11**	**280.667.750,00**
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	15.461.879.740,00	12.231.970.843,69	79,11	280.667.750,00

Tabel 7.5.106 Rincian Belanja Modal Bangunan Air – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Bangunan Air	**2.738.054.230,00**	**1.658.836.030,00**	**60,58**	**1.149.877.370,00**
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	**2.738.054.230,00**	**1.658.836.030,00**	**60,58**	**1.149.877.370,00**
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	2.738.054.230,00	1.658.836.030,00	60,58	1.149.877.370,00

Tabel 7.5.107 Rincian Belanja Modal Instalasi – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Instalasi	**28.000.487.131,00**	**20.552.263.179,00**	**73,40**	**483.000.000,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	**8.590.431,00**	**8.530.350,00**	**99,30**	**0,00**
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	8.590.431,00	8.530.350,00	99,30	0,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	**21.128.296.700,00**	**13.687.296.700,00**	**64,78**	**483.000.000,00**
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	1.164.286.300,00	1.164.286.300,00	100,00	0,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	19.964.010.400,00	12.523.010.400,00	62,73	483.000.000,00
Belanja Modal Instalasi Lain	**6.863.600.000,00**	**6.856.436.129,00**	**99,90**	**0,00**
Belanja Modal Instalasi Lain	6.863.600.000,00	6.856.436.129,00	99,90	0,00

Tabel 7.5.108 Belanja Modal Jaringan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Jaringan	**5.886.664.980,00**	**4.932.419.531,41**	**83,79**	**2.870.353.036,47**
Belanja Modal Jaringan Air Minum	**1.357.500.000,00**	**403.254.553,20**	**29,71**	**359.957.529,37**
Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi	1.357.500.000,00	403.254.553,20	29,71	359.957.529,37
Belanja Modal Jaringan Listrik	**4.529.164.980,00**	**4.529.164.978,21**	**100,00**	**2.510.395.507,10**
Belanja Modal Jaringan Distribusi	4.529.164.980,00	4.529.164.978,21	100,00	1.966.500.854,00
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	543.894.653,10

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.109 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
A	**EKONOMI**	**39.042.150.965,90**
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	18.216.461.678,21
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	20.825.689.287,69
B	**KESEHATAN**	**6.831.540.000,00**
1	Dinas Kesehatan	668.500.000,00
2	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	6.163.040.000,00
C	**PELAYANAN UMUM**	**33.426.479,00**
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	24.896.129,00

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
2	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	8.530.350,00
D	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**403.254.553,20**
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	403.254.553,20
	JUMLAH	**46.310.371.998,10**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per masing-masing OPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.110 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per masing-masing OPD Tahun 2025– LRA

NO	OPD	NILAI BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	18.216.461.678,21
2	Dinas Kesehatan	668.500.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	21.253.839.969,89
4	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	8.530.350,00
5	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	6.163.040.000,00
	JUMLAH	**46.310.371.998,10**

7.5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	21.970.627.692,00	**21.957.775.186,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah pembelian barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, jurnal ilmiah, dan belanja pengadaan Aset Tetap Renovasi.

Pada tahun 2025 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp21.957.775.186,00 atau sebesar 99,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.970.627.692,00**.** Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.111 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**21.970.627.692,00**	**21.957.775.186,00**	**99,94**	**19.630.419.447,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	270.550.000,00	160.941.535,00	59,49	358.800.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	278.775.000,00	168.761.000,00	60,54	1.299.940.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	17.971.679.447,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	21.421.302.692,00	21.628.072.651,00	100,97	0,00

Dengan rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.112 Rincian Belanja Modal Bahan Perpustakaan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	**270.550.000,00**	**160.941.535,00**	**59,49**	**358.800.000,00**
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	**270.550.000,00**	**160.941.535,00**	**59,49**	**0,00**
Belanja Modal Buku Umum	270.550.000,00	160.941.535,00	59,49	0,00
Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358.800.000,00**
Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	0,00	0,00	0,00	358.800.000,00

Tabel 7.5.113 Rincian Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	**278.775.000,00**	**168.761.000,00**	**60,54**	**1.299.940.000,00**
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	**153.775.000,00**	**43.775.000,00**	**28,47**	**1.299.940.000,00**
Belanja Modal Alat Musik	153.775.000,00	43.775.000,00	28,47	1.299.940.000,00
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	**125.000.000,00**	**124.986.000,00**	**99,99**	**0,00**
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	125.000.000,00	124.986.000,00	99,99	0,00

Tabel 7.5.114 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.971.679.447,00**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.971.679.447,00**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	17.971.679.447,00

Pada Tahun 2024, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS disajikan pada kode akun objek 5.2.05.88 dengan uraian akun objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS berikut rincian objek beserta sub rincian objeknya. Selanjutnya pada Tahun 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana akun tersebut dimutakhirkan menjadi kode akun objek 5.2.05.89 dengan uraian akun objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP berikut rincian objek beserta sub rincian objeknya.

Tabel 7.5.115 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	**21.421.302.692,00**	**21.628.072.651,00**	**100,97**	**0,00**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	**21.421.302.692,00**	**21.628.072.651,00**	**100,97**	**0,00**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	21.421.302.692,00	21.628.072.651,00	100,97	0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.116 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA
A	**PENDIDIKAN**	**21.952.780.186,00**
1	Dinas Kebudayaan	124.986.000,00
2	Dinas Pendidikan	21.671.847.651,00
3	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	155.946.535,00
B	**PERLINDUNGAN SOSIAL**	**4.995.000,00**
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4.995.000,00

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA
	JUMLAH	**21.957.775.186,00**

7.5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.125.753.000,00	**600.244.500,00**

Belanja Modal Aset Lainnya merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Pada tahun 2025 Belanja Modal Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp600.244.500,00 atau sebesar 53,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.125.753.000,00. Tidak tercapainya realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud dari target yang ditetapkan dikarenakan tidak direalisasikannya beberapa belanja modal seperti pengadaan alat kesehatan, lampu penerangan RS, Baterai UPS, dan AC RS yang disebabkan tidak tercapainya target pendapatan BLUD untuk menghindari terjadinya bertambahnya utang belanja. Rincian Belanja Modal Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.117 Belanja Modal Aset Lainnya

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Aset Lainnya	**1.125.753.000,00**	**600.244.500,00**	**53,32**	**5.389.675.894,00**
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	**125.753.000,00**	**120.660.500,00**	**95,95**	**0,00**
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	**125.753.000,00**	**120.660.500,00**	**95,95**	**0,00**
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	2.601.000,00	2.575.000,00	99,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	123.152.000,00	118.085.500,00	95,89	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	**1.000.000.000,00**	**479.584.000,00**	**47,96**	**5.389.675.894,00**
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	**1.000.000.000,00**	**479.584.000,00**	**47,96**	**5.389.675.894,00**
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.000.000.000,00	479.584.000,00	47,96	5.389.675.894,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.118 Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA MODAL ASET LAINNYA
	PELAYANAN UMUM	
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	88.855.500,00
2	Badan Pendapatan Daerah	31.805.000,00
3	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	479.584.000,00
	JUMLAH	**600.244.500,00**

7.5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	2.281.396.903,60	**0,00**

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Pada tahun 2025 Belanja Tidak Terduga tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp2.281.396.903,60 dikarenakan tidak ada peristiwa yang mengakibatkan adanya pengeluaran dari belanja tidak terduga. Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi adanya bencana yang harus segera diatasi dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

7.5.1.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	716.816.050.533,00	**704.188.430.644,00**

Belanja Transfer merupakan belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan pengeluaran anggaran dalam bentuk bantuan uang kepada Pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pada tahun 2025 Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp704.188.430.644,00 atau sebesar 98,24% dari yang dianggarkan di APBD sebesar Rp716.816.050.533,00.

Rincian Belanja Transfer dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.119 Belanja Transfer – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
BELANJA TRANSFER	**716.816.050.533,00**	**704.188.430.644,00**	98,24	**775.144.201.015,00**
Belanja Bagi Hasil	698.706.050.533,00	690.951.951.944,00	98,89	748.291.201.015,00
Belanja Bantuan Keuangan	18.110.000.000,00	13.236.478.700,00	73,09	26.853.000.000,00

7.5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	698.706.050.533,00	**690.951.951.944,00**

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penyaluran dana bagi hasil kepada kabupaten/kota sebagai kompensasi bagi hasil atas pajak-pajak daerah. Belanja bagi hasil pajak daerah tahun 2025 terealisasi sebesar Rp690.951.951.944,00 atau 98,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp698.706.050.533,00. Alokasi dan Penyaluran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 431 Tahun 2025 tentang Alokasi Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 430 Tahun 2025 tentang Besaran Tunda Salur Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. Untuk Penyaluran Bagi Hasil Pajak Rokok dilakukan berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok, yang menyebutkan bahwa Gubernur menyalurkan bagi hasil Pajak Rokok kepada kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Pajak Rokok di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi. Rincian Belanja Bagi Hasil dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.120 Belanja Bagi Hasil – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Bagi Hasil	**698.706.050.533,00**	**690.951.951.944,00**	**98,89**	**748.291.201.015,00**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	**698.706.050.533,00**	**690.951.951.944,00**	**98,89**	**748.291.201.015,00**

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	**297.113.512.718,00**	**293.134.575.850,00**	**98,66**	**330.924.905.661,00**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	297.113.512.718,00	293.134.575.850,00	98,66	330.924.905.661,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	**401.592.537.815,00**	**397.817.376.094,00**	**99,06**	**417.366.295.354,00**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	401.592.537.815,00	397.817.376.094,00	99,06	417.366.295.354,00

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.121 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2024 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2025	TOTAL (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kota Batam	108.774.500.374,00	205.665.619.318,00	314.440.119.692,00
2	Kota Tanjung Pinang	26.418.004.595,00	56.959.251.807,00	83.377.256.402,00
3	Kab. Bintan	21.684.975.192,00	47.943.206.739,00	69.628.181.931,00
4	Kab. Karimun	21.289.602.585,00	50.190.975.819,00	71.480.578.404,00
5	Kab. Natuna	17.546.888.639,00	38.664.221.886,00	56.211.110.525,00
6	Kab. Lingga	15.645.671.052,00	33.957.182.904,00	49.602.853.956,00
7	Kab. Anambas	15.117.049.818,00	31.094.801.216,00	46.211.851.034,00
JUMLAH		**226.476.692.255,00**	**464.475.259.689,00**	**690.951.951.944,00**

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.122 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Batam – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2024 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2025 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kota Batam	**108.774.500.374,00**	**205.665.619.318,00**	**314.440.119.692,00**
1	PKB	30.785.210.269,00	11.482.905.809,00	42.268.116.078,00
2	BBN-KB	32.043.918.811,00	6.001.708.027,00	38.045.626.838,00
3	P-AP	64.820.058,00	5.731.455.469,00	5.796.275.527,00
4	PBB-KB	45.880.551.236,00	138.391.212.941,00	184.271.764.177,00
5	PAJAK ROKOK	0,00	44.058.337.072,00	44.058.337.072,00

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.123 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Tanjungpinang – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2024 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2025 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kota Kota Tanjungpinang	**26.418.004.595,00**	**56.959.251.807,00**	**83.377.256.402,00**
1	PKB	7.949.365.924,00	3.056.625.094,00	11.005.991.018,00
2	BBN-KB	6.540.224.279,00	971.135.227,00	7.511.359.506,00
3	P-AP	39.079.951,00	1.632.535.929,00	1.671.615.880,00
4	PBB-KB	11.889.334.441,00	35.862.241.627,00	47.751.576.068,00
5	PAJAK ROKOK	0,00	15.436.713.930,00	15.436.713.930,00

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.124 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Bintan – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2024 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2025 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kabupaten Bintan	**21.684.975.192,00**	**47.943.206.739,00**	**69.628.181.931,00**
1	PKB	6.163.941.432,00	2.320.926.414,00	8.484.867.846,00
2	BBN-KB	5.760.027.932,00	968.757.429,00	6.728.785.361,00
3	P-AP	23.842.352,00	1.853.170.332,00	1.877.012.684,00
4	PBB-KB	9.737.163.476,00	29.370.568.304,00	39.107.731.780,00
5	PAJAK ROKOK	0,00	13.429.784.260,00	13.429.784.260,00

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.125 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Karimun – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2024 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2025 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kabupaten Karimun	**21.289.602.585,00**	**50.190.975.819,00**	**71.480.578.404,00**
1	PKB	6.152.271.199,00	2.389.908.590,00	8.542.179.789,00
2	BBN-KB	5.316.702.961,00	853.591.629,00	6.170.294.590,00
3	P-AP	17.808.053,00	1.173.538.661,00	1.191.346.714,00
4	PBB-KB	9.802.820.372,00	29.568.611.645,00	39.371.432.017,00
5	PAJAK ROKOK	0,00	16.205.325.294,00	16.205.325.294,00

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.126 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Natuna – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2024 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2025 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kabupaten Natuna	**17.546.888.639,00**	**38.664.221.886,00**	**56.211.110.525,00**
1	PKB	4.894.244.469,00	1.857.609.311,00	6.751.853.780,00
2	BBN-KB	4.791.027.327,00	854.699.829,00	5.645.727.156,00
3	P-AP	17.602.233,00	1.167.769.595,00	1.185.371.828,00
4	PBB-KB	7.844.014.610,00	23.660.192.979,00	31.504.207.589,00
5	PAJAK ROKOK	0,00	11.123.950.172,00	11.123.950.172,00

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.127 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Lingga – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2024 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2025 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kabupaten Lingga	**15.645.671.052,00**	**33.957.182.904,00**	**49.602.853.956,00**
1	PKB	4.842.482.384,00	1.835.322.475,00	6.677.804.859,00
2	BBN-KB	4.639.805.541,00	804.738.429,00	5.444.543.970,00
3	P-AP	15.302.578,00	1.142.180.342,00	1.157.482.920,00
4	PBB-KB	6.148.080.549,00	18.544.684.001,00	24.692.764.550,00
5	PAJAK ROKOK	0,00	11.630.257.657,00	11.630.257.657,00

Rincian Realisasi Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.128 Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas – LRA

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI PEMBAYARAN TUNDA BAYAR 2024 (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN 2025 (Rp)	TOTAL (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kabupaten Kepulauan Anambas	**15.117.049.818,00**	**31.094.801.216,00**	**46.211.851.034,00**
1	PKB	4.715.945.807,00	1.778.668.339,00	6.494.614.146,00
2	BBN-KB	4.619.033.355,00	811.707.429,00	5.430.740.784,00
3	P-AP	13.750.497,00	987.791.544,00	1.001.542.041,00
4	PBB-KB	5.768.320.159,00	17.399.198.614,00	23.167.518.773,00
5	PAJAK ROKOK	0,00	10.117.435.290,00	10.117.435.290,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.129 Realisasi Belanja Bagi Hasil menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA BAGI HASIL
A	**PELAYANAN UMUM**	**690.951.951.944,00**
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	690.951.951.944,00
	JUMLAH	**690.951.951.944,00**

7.5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	18.110.000.000,00	**13.236.478.700,00**

Belanja Bantuan Keuangan adalah dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Ketentuan Belanja Bantuan Keuangan diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja bantuan keuangan tahun 2025 terealisasi sebesar Rp13.236.478.700,00 atau 73,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.110.000.000,00. Belanja Bantuan Keuangan pada tahun 2025 digunakan antara lain:

1. Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi terealisasi sebesar Rp1.500.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1280 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus dalam Rangka Penanganan Dampak Bencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.
2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp4.027.313.100,00 atau 46,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.697.000.000,00 sesuai dengan permohonan penyaluran/pencairan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 167 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dalam Rangka Operasional Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 720 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 167 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dalam Rangka Operasional Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan Provinsi Kepulauan Riau.

3. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa terealisasi sebesar Rp7.709.165.600,00 atau 97,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.913.000.000,00 sesuai dengan permohonan penyaluran/pencairan yang diajukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 167 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dalam Rangka Operasional Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 720 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 167 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dalam Rangka Operasional Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan Provinsi Kepulauan Riau.

Berikut dibawah ini dijelaskan tabel rincian Belanja Bantuan Keuangan.

Tabel 7.5.130 Belanja Bantuan Keuangan – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Bantuan Keuangan	**18.110.000.000,00**	**13.236.478.700,00**	**73,09**	**26.853.000.000,00**
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**100,00**	**500.000.000,00**
Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**100,00**	**500.000.000,00**
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	500.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	**8.697.000.000,00**	**4.027.313.100,00**	**46,31**	**14.130.500.000,00**
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	**8.697.000.000,00**	**4.027.313.100,00**	**46,31**	**14.130.500.000,00**
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	8.697.000.000,00	4.027.313.100,00	46,31	14.130.500.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	**7.913.000.000,00**	**7.709.165.600,00**	**97,42**	**12.222.500.000,00**
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	**7.913.000.000,00**	**7.709.165.600,00**	**97,42**	**12.222.500.000,00**
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	7.913.000.000,00	7.709.165.600,00	97,42	12.222.500.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan menurut klasifikasi fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.131 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan menurut Klasifikasi Fungsi Tahun 2025 – LRA

NO	KLASIFIKASI FUNGSI	NILAI BELANJA BANTUAN KEUANGAN
A	**PELAYANAN UMUM**	**13.236.478.700,00**
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	13.236.478.700,00
	JUMLAH	**13.236.478.700,00**

7.5.1.3. Surplus/Defisit

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi defisit APBD sebesar Rp(3.169.898.762,08). Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp(110.282.197.800,53) dibandingkan defisit tahun 2024 sebesar Rp(113.452.096.562,61) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.132 Surplus/Defisit Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024	KENAIKAN /PENURUNAN (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
PENDAPATAN DAERAH	**3.910.214.946.462,43**	**3.712.434.360.163,46**	**94,94**	**3.958.295.361.262,68**	**245.861.001.099,22**
BELANJA DAERAH	**3.932.501.110.900,44**	**3.715.604.258.925,54**	**94,48**	**4.071.747.457.825,29**	**356.143.198.899,75**
SURPLUS/DEFISIT	**(22.286.164.438,01)**	**(3.169.898.762,08)**	**14,22**	**(113.452.096.562,61)**	**(110.282.197.800,53)**

7.5.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Selama Tahun Anggaran 2025 realisasi pembiayaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

7.5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	27.286.164.438,01	**27.291.476.128,01**

Penerimaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan rekening kas umum daerah yang perlu dibayar kembali. Pada tahun 2025 Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp27.291.476.128,01 atau 100,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.286.164.438,01. Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan yang terdiri dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp27.208.640.128,01 atau 99,72% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp27.286.164.438,01 dan Penerimaan Kembali

Investasi Non Permanen Lainnya (Penarikan Dana Bergulir) sebesar Rp82.836.000,00 dari yang semula tidak dianggarkan.

7.5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	5.000.000.000,00	**5.000.000.000,00**

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberiaan pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu. Pada Tahun 2025 Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada PT. Energi Kepri (Perseroda) yang baru didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri. Terhadap penyertaan modal kepada PT. Energi Kepri (Perseroda) diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri.

7.5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

SiLPA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0.00	**19.121.577.365,93**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan adalah Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode tahun berjalan. Pada tahun 2025 realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah sebesar Rp19.121.577.365,93, realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp8.164.587.072,08 atau sebesar 29,92% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp27.286.164.438,01 dikarenakan optimalisasi penyerapan belanja daerah yang diselaraskan dengan ketersediaan kas yang ada pada Rekening Kas Umum Daerah.

Terdapat perbedaan sebesar Rp235.063.410,00 antara realisasi SiLPA dengan Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas yang tercatat sebesar Rp19.356.640.775,93. Rincian selisih tersebut terdapat pada:

1. Kas di Kas Daerah, yang merupakan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang timbul atas *outstanding* penyetoran pajak di akhir tahun 2025 sebesar Rp33.872.068,00 yang telah diproses oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah melalui penerbitan SP2D di tahun 2025 namun pengurangan nilai rekening Kas Daerah baru diproses oleh pihak perbankan pada tanggal 1 Januari 2026;

2. Kas Lainnya yang merupakan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang timbul atas pemotongan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2025 sebesar Rp110.300.242,00; dan
3. Kas Lainnya berupa kewajiban atas Dana Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang belum disalurkan per 31 Desember 2025 sebesar Rp90.891.100,00.

Sementara itu komponen pembentuk SiLPA pada Neraca tahun 2025 sebesar Rp19.121.577.365,93 terdiri dari:

1. Kas di Kas Daerah sebesar Rp14.322.873.348,90 (saldo di rekening Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.356.745.416,90, namun pada saldo tersebut terdapat saldo *outstanding* penyetoran pajak (Utang PFK) sebesar Rp33.872.068,00 yang merupakan pengurang komponen pembentuk SiLPA);
2. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp311.609.541,00 merupakan saldo kas yang berada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang masih harus dipertanggung jawabkan oleh Bendahara Pengeluaran antara lain yaitu:
   a. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp3.867.681,00;
   b. Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp1.276.500,00;
   c. Dinas Kesehatan sebesar Rp823.468,00;
   d. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp303.050.792,00;
   e. Sekretariat Daerah (Biro Hukum) sebesar Rp2.591.100,00
3. Kas di BLUD sebesar Rp2.499.584.868,03;
4. Kas Lainnya sebesar Rp520.089,00 yang merupakan jasa giro yang belum dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah per 31 Desember 2025.
5. Kas Dana BOSP sebesar Rp1.986.989.519,00.

Selanjutnya dari total saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp14.322.873.348,90 tersebut, terdapat saldo kas yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp7.375.469.721,96 bersifat *earmark* yang alokasi dan penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan petunjuk teknis perundang-undangan dari masing-masing sumber pendanaan sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.133 Rincian Saldo Kas Dana Earmark

No.	Jenis Dana Earmark	Saldo per 31 Desember 2025
	Dana Bagi Hasil (DBH)	**1.127.877.184,00**
1	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	90.744.325,00
2	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	944.307.069,00
3	DBH Sawit	92.825.790,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	**1.700.035.055,60**
1	DAU SG bidang Pendidikan	1.153.005.065,00
2	DAU SG bidang Kesehatan	457.918.607,75
3	DAU SG bidang Pekerjaan Umum	89.111.382,85
	DAK Fisik	**814.502.585,36**
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	2.619.320,20
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	582.407.006,19
3	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	163.119.127,68
4	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup	13.588.577,00
5	DAK Fisik-Bidang ESDM	231.490,00

No.	Jenis Dana Earmark	Saldo per 31 Desember 2025
6	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	558.476,18
7	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	3,00
8	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	10.690.076,31
9	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	40.196.760,52
10	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan	1.091.748,28
	DAK Non Fisik	**3.485.089.865,00**
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	1.097.577.208,00
2	DAK Non Fisik-TKG PNSD	25.866.100,00
3	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	73.310.681,00
4	DAK Non Fisik-PK2UKM	1.486.686.561,00
5	DAK Non Fisik-BOKB-KB	532.993.472,00
6	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	51.450.411,00
7	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	199.588.292,00
8	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	17.617.140,00
	Insentif Fiskal	**247.965.032,00**
1	Dana Insentif Fiskal	247.965.032,00
	Jumlah	**7.375.469.721,96**

7.5.2. Penjelasan Atas Pos – Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a. Saldo Awal SAL (Saldo Anggaran Lebih);
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
e. Lain-lain;
f. Saldo Akhir SAL (Saldo Anggaran Lebih).

Laporan Perubahan Saldo Akhir SAL (Saldo Anggaran Lebih) dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah daerah. Di samping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur - unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Akhir SAL (Saldo Anggaran Lebih) dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.5.2.1. Saldo Awal SAL (Saldo Anggaran Lebih)

Saldo Awal SAL	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	27.286.164.438,01	**231.214.715.013,24**

Pada awal tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Saldo Awal SAL sebesar Rp27.286.164.438,01, yang merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024.

7.5.2.2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	27.208.640.128,01	**232.583.164.925,62**

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan digunakan dalam rangka membiayai defisit APBD tahun anggaran berjalan. Penggunaan SAL dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. SAL dilaporkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. SAL sebagaimana merupakan bagian dari ekuitas dana dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp27.208.640.128,01 atau sebesar 99,72% dari SiLPA yang dianggarkan sebesar Rp27.286.164.438,01. Selisih tidak terealisasi sebesar Rp77.524.310,00 disebabkan oleh koreksi kesalahan pembukuan dan pengembalian dana pada BLUD SMKN, dijelaskan sebagai berikut:

a. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp19.938.600,00 pada BLUD SMKN 1 Batam yang merupakan sisa kas bantuan pemerintah pusat yang sudah dikembalikan ke pemerintah pusat pada tanggal 31 Desember 2024.
b. Koreksi saldo awal kas BLUD SMKN 1 Batam sebesar Rp40.200.000,00 yang merupakan sisa kas bantuan personil siswa yang bersumber dari kegiatan Dinas Pendidikan dan diakui sebagai pendapatan BLUD SMKN 1 Batam pada tahun 2024 tetapi sudah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 31 Januari 2025.
c. Koreksi saldo awal kas BLUD SMKN 1 Batam sebesar Rp631.786,00 yang merupakan sisa kas SPP pada tahun 2024 dan sudah dikembalikan ke orang tua siswa pada tanggal 16 Januari 2025.
d. Koreksi saldo awal kas BLUD SMKN 2 Batam sebesar Rp24.401.924,00 yang merupakan sisa kas dari bantuan personil siswa yang bersumber dari kegiatan Dinas Pendidikan dan diakui sebagai pendapatan BLUD SMKN 2 Batam pada tahun 2024 tetapi sudah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 14 Februari 2025.
e. Koreksi penambahan saldo awal kas BLUD SMKN 1 Bintan Timur sebesar Rp1.948.000,00 dan SMKN Kundur sebesar Rp5.700.000,00 pada awal tahun 2025 yang merupakan saldo TEFA tahun 2024.

Pada tahun anggaran 2025 Pendapatan dan Belanja atas 19 (sembilan belas) BLUD SMKN sudah dianggarkan pada APBD, akan tetapi terhadap sisa kas belum teranggarkan pada penerimaan pembiayaan pada komponen SiLPA BLUD.

7.5.2.3. Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)

Selisih Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	19.121.577.365,93	**27.286.164.438,01**

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SiLPA tahun berjalan sebesar Rp19.121.577.365,93.

7.5.3. Penjelasan Pos – Pos Neraca

7.5.3.1. Aset

Aset	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	6.815.191.552.141,75	**7.105.534.873.977,98**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.815.191.552.141,75 terjadi penurunan sebesar Rp290.343.321.836,23 atau sebesar 4,09% dibandingkan dengan saldo Aset tahun 2024 sebesar Rp7.105.534.873.977,98 yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.134 Rincian Aset

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)		
Aset Lancar	143.020.502.083,83	386.123.239.870,43	(243.102.737.786,60)	(62,96)
Investasi Jangka Panjang	135.977.916.508,00	138.205.300.338,00	(2.227.383.830,00)	(1,61)
Aset Tetap	5.898.355.749.529,72	6.039.363.970.380,51	(141.008.220.850,79)	(2,33)
Aset Lainnya	535.191.876.315,99	541.842.363.389,04	(6.650.487.073,05)	(1,23)
Properti Investasi	102.645.507.704,21	0,00	102.645.507.704,21	0,00
Saldo Akhir Aset	**6.815.191.552.141,75**	**7.105.534.873.977,98**	**(290.343.321.836,23)**	**(4,09)**

7.5.3.1.1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dapat berupa:

- Kas dan setara kas
- Investasi jangka pendek
- Piutang Pajak Daerah
- Piutang Retribusi Daerah
- Piutang Lain-lain PAD yang Sah
- Piutang Lainnya dan
- Persediaan

Aset Lancar sebesar Rp143.020.502.083,83 per 31 Desember 2025 yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Lainnya, Kas Dana BOSP, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

7.5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	14.356.745.416,90	**23.302.940.904,77**

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas bersih pemerintah daerah setelah dikurangi dengan *Outstanding Check* yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Saldo Kas di Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.356.745.416,90. Saldo Kas di Kas Daerah tersebut tidak termasuk saldo pada Rekening Bank pada Bank Bukopin dengan Nama Rekening DKUKM Pengembalian Dana Bergulir / Nomor Rekening 100-01-21394 yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau. Rekening Bank tersebut secara subtansi tidak dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pembukaan rekening terjadi pada akhir tahun 2007 dikarenakan adanya himbauan dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk membuka rekening penampung pengembalian Dana Bergulir Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diperuntukkan bagi penerima manfaat dana bergulir yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan untuk memudahkan koordinasi dan pemantauan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4, bahwa Pengelola Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga dilakukan oleh Satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU (Satker BLU). Dana Bergulir yang digulirkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau mulai tahun 2000 sampai dengan 2007 mencapai Rp4.620.000.000,00. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2025 sebesar Rp162.010.920,90.

Dari total saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp14.356.745.416,90, terdapat *outstanding* penyetoran pajak di akhir tahun 2025 sebesar Rp33.872.068,00 yang telah diproses oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah melalui penerbitan SP2D di tahun 2025 namun pengurangan nilai rekening Kas Daerah baru diproses oleh pihak perbankan pada tanggal 1 Januari 2026.

Dengan demikian, berikut dijelaskan tabel Kas di Kas Daerah:

Tabel 7.5.135 Kas Di Kas Daerah

I	NO	NO. REKENING	BANK	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
					KREDIT	DEBET	
	1	106-01-00001	BANK RIAU KEPRI SYARIAH BATAM BEND UMUM DAERAH (PAD)	236.370.522,84	124.028.176.775,50	124.220.290.871,00	44.256.427,34
	2	103-01-00310	BANK RIAU KEPRI SYARIAH TANJUNGPINANG RKUD PROV. KEPULAUAN RIAU	7.659.102.531,42	3.222.680.709.921,51	3.221.477.914.486,32	8.861.897.966,61
	3	100-137-0240	BANK BUKOPIN PEMPROV KEPRI (PAD)	971.620.711,23	1.546.725.532,56	2.400.115.000,00	118.231.243,79
	4	100-030-8397	BANK BUKOPIN RKUD PROV KEPULAUAN RIAU	6.145.028.931,65	2.056.105.016.248,26	2.062.249.210.582,26	834.597,65
	5	100-999-9249	BANK BUKOPIN PEMPROV KEPRI	2.312.974,55	115.000,00	115.000,00	2.312.974,55
	6	109-00-9988990-9	BANK MANDIRI REKENING KAS UMUM DAERAH PROVINSI KEPRI	8.460.934,04	0,00	0,00	8.460.934,04
	7	7012752468	BANK SYARIAH INDONESIA KASDA	2.160.451,92	121.031.176.048,72	120.900.103.500,00	133.233.000,64
	8	00000174-01-001317-30-4	BANK RAKYAT INDONESIA PEMPROV KEPRI PAD	5.239.323.274,71	1.174.657.627.226,00	1.177.884.523.784,00	2.012.426.716,71
				20.264.380.332,36	**6.700.049.546.752,55**	**6.709.132.273.223,58**	**11.181.653.861,33**
	9	100-131-0247	BUKOPIN KASDA PROV KEPRI EX POKJA	28.098.857,99	4.256.923,33	190.266,17	32.165.515,15
	10	100-015-4390	BANK BUKOPIN KASDA PEMPROV KEPRI EX 2007	50.660.504,84	241.300,44	241.300,44	50.660.504,84
	11	100-012-2391	BANK BUKOPIN KASDA PEMPROV KEPRI EX ESSCROW	536.185.155,02	34.536.980,07	6.636.980,07	564.085.155,02
	12	100-031-0391	BANK BUKOPIN KASDA PEMPROV KEPRI EX 2010	19.757.183,11	115.000,00	115.000,00	19.757.183,11
	13	100-140-9243	BANK BUKOPIN KASDA PROV KEPRI QQ DKP 5	278.290,48	205.000,00	205.000,00	278.290,48
	14	100-023-8399	BANK BUKOPIN KASDA PEMPROV KEPRI EX KIOS PK	173.360,97	205.000,00	205.000,00	173.360,97
	15	103-01-00306	BANK RIAU KEPRI SYARIAH KASDA (DANA BERGULIR) PROVKEPRI	67.879.777,00	629.619,00	0,00	68.509.396,00
	16	103-01-00307	BANK RIAU KEPRI SYARIAH KASDA (PENG. POKOK DANA) PROVKEPRI	2.199.386.749,00	85.147.459,00	10.000.000,00	2.274.534.208,00
	17	103-01-00308	BANK RIAU KEPRI SYARIAH KASDA (PENG. BUNGA DANA) PROVKEPRI	163.015.594,00	4.372.778,00	2.460.430,00	164.927.942,00
				3.065.435.472,41	**129.710.059,84**	**20.053.976,68**	**3.175.091.555,57**
			JUMLAH	**23.329.815.804,77**	**6.700.179.256.812,39**	**6.709.152.327.200,26**	**14.356.745.416,90**
II	**SALDO KAS DAERAH PER 31 DESEMBER 2025**						**14.356.745.416,90**

7.5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	311.609.541,00	**19.041.006,00**

Merupakan saldo kas yang berada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp311.609.541,00 yang terdiri dari Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp3.867.681,00 yang sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 02 Januari 2026, Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp1.276.500,00 yang sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 2 Februari 2026, Dinas Kesehatan sebesar Rp823.468,00 yang sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2026, Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp303.050.792,00 yang sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2026 dan Sekretariat Daerah (Biro Hukum) sebesar Rp2.591.100,00 yang sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 18 Februari 2026.

7.5.3.1.1.3 Kas di BLUD

Kas di BLUD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	2.499.584.868,03	**2.264.885.131,34**

Merupakan kas yang berada dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp665.991.783,57 dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp191.249.243,48 serta 19 (sembilan belas) SMK Negeri BLUD sebesar Rp1.642.343.840,98 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.136 Kas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	19.662.250,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Syariah Indonesia (9988997886)	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (103-01-01920)	69.555.727,28
4	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD) pada Bank Riau Kepri Syariah (1.800.180.180)	0,00
6	Kas di BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.800.101.010)	576.773.806,29
TOTAL		**665.991.783,57**

Tabel 7.5.137 Kas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	1.445.939,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Syariah Indonesia (7030374937)	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1460101234)	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1460112345)	189.803.304,48
6	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Syariah Indonesia (7030374929)	0,00
TOTAL		**191.249.243,48**

Tabel 7.5.138 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 1 Batam

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	3.208.960,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1940100007)	288.871.568,00
Total		**292.080.528,00**

Tabel 7.5.139 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 2 Batam

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	65,98
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	443.639,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.060.100.040)	215.105.036,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.060.100.041)	5.416.857,00
Total		**220.965.597,98**

Tabel 7.5.140 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 3 Batam

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.940.100.009)	1.053,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.940.100.010)	2.291,00
5	Kas di BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.940.100.011)	21.151.850,00
Total		**21.155.194,00**

Tabel 7.5.141 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 4 Batam

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
3	Kas di Bendahara Dana Revitalisasi BLUD Tunai	0,00
4	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (8.240.100.007)	62.150,00
5	Kas di BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (8.240.100.008)	70.910.630,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran pada Bank Riau Kepri Syariah (8.240.100.009)	1.558,00
7	Kas di Bendahara Dana Revitalisasi pada BNI (1974062983)	0,00
Total		**70.974.338,00**

Tabel 7.5.142 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 5 Batam

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	4.609.100,00
3	Kas di BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.610.100.007)	55.668.721,00
Total		**60.277.821,00**

Tabel 7.5.143 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 6 Batam

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (186-20-01640)	50.000,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (186.43.01444)	4.815.673,00
5	Kas di Bendahara SPP Tunai	9,00
Total		**4.865.682,00**

Tabel 7.5.144 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 7 Batam

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	60,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	3.913.431,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.860.100.007)	12.329,00
4	Kas di BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.860.100.008)	3,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.860.100.009)	3,00
Total		**3.925.826,00**

Tabel 7.5.145 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 1 Tanjungpinang

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1030100090)	17.911,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1030100089)	60,00
5	Kas di BLUD pada Bank Syariah Indonesia (1030100091)	685.658.098,00
Total		**685.676.069,00**

Tabel 7.5.146 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 2 Tanjungpinang

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.030.100.087)	17.222,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.030.100.088)	9.418,00
5	Kas di BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.030.100.082)	193.682.197,00
6	Kas di Bendahara Bantuan Pemerintah Pelajaran Mendalam pada Bank Rakyat Indonesia (354801000041308)	0,00
Total		**193.708.837,00**

Tabel 7.5.147 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 3 Tanjungpinang

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
3	Kas di BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.030.100.100)	20.636.464,00
Total		**20.636.464,00**

Tabel 7.5.148 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 4 Tanjungpinang

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
3	Kas di BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.030.100.101)	79.095,00
Total		**79.095,00**

Tabel 7.5.149 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 1 Bintan Timur

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
3	Kas di BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.350.100.017)	17.717.964,00
Total		**17.717.964,00**

Tabel 7.5.150 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 1 Bintan Utara

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	430.000,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	4.276.700,00
3	Kas di BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.460.100.001)	12.535.335,00
Total		17.242.035,00

Tabel 7.5.151 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 1 Karimun

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	4.250.000,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
3	Kas di BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1110100015)	6.916.187,00
Total		**11.166.187,00**

Tabel 7.5.152 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 2 Karimun

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (8270100002)	4.089.972,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (8270100001)	2.666,00
Total		**4.092.638,00**

Tabel 7.5.153 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri Kundur

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	3.218.300,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	321.900,00
3	Kas di BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.230.300.042)	5.061.361,00
Total		**8.601.561,00**

Tabel 7.5.154 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri Kundur Utara

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran pada Bank Riau Kepri Syariah (1.230.100.010)	0,00
4	Kas di BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1.230.100.011)	1.583.018,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan pada Bank Riau Kepri Syariah (1.230.100.012)	2.911,00
Total		1.585.929,00

Tabel 7.5.155 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 1 Singkep

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	2.500.000,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan pada Bank Riau Kepri Syariah (1.250.100.009)	3.512.035,00
Total		6.012.035,00

Tabel 7.5.156 Kas Badan Layanan Umum Daerah SMK Negeri 1 Bunguran Barat

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tunai	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Tunai	0,00
3	Kas di BLUD pada Bank Riau Kepri Syariah (1170100021)	1.580.040,00
Total		1.580.040,00

7.5.3.1.1.4 Kas Lainnya

Kas Lainnya	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	201.711.431,00	**524.292.676,64**

Kas Lainnya digunakan untuk mencatat kas selain kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, dan kas dana BOSP. Menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 14 tentang Akuntasi Kas, dimana apabila sampai dengan tanggal neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan dan juga berasal dari potongan pajak pemerintah, jumlah tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas Lainnya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo Kas Lainnya pada tahun 2025 sebesar Rp201.711.431,00 terdiri dari:

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang timbul atas pemotongan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2025 sebesar Rp110.300.242,00;
2. Jasa giro yang belum dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp520.089,00;
3. Dana Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang belum disalurkan per 31 Desember 2025 sebesar Rp90.891.100,00. Adapun pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyediaan Biaya Personil Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kepulauan Riau dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 50 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Berikut ini adalah tabel rekapitulasi kas lainnya:

Tabel 7.5.157 Rekapitulasi Kas lainnya Per 31 Desember 2025

NO	SKPD	PPh21	PPh22	PPh23	PPh Ps 4 (2)	PPN	JUMLAH PFK 2025	JASA GIRO	BANTUAN BIAYA PERSONIL	SALDO KAS LAINNYA 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(3+4+5+6+7)*	*9*	*10*	*11= 8 + 9+10*
1	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Selat Gelam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.987,00	0,00	32.987,00
2	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMKN 2 Lingga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.805,00	0,00	79.805,00
3	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMKN 10 Batam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.441,00	0,00	311.441,00
4	Dinas Pendidikan (BLUD) SMKN 2 Karimun	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
5	Dinas Pendidikan (BLUD) SMKN 3 Batam	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6	Dinas Pendidikan (BLUD) SMKN 5 Batam	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
7	Dinas Pendidikan (BLUD) SMKN 1 Bintan Timur	0,00	0,00	299.956,00	0,00	2.199.681,00	2.499.637,00	0,00	0,00	2.499.637,00
8	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Lingga Utara	162.000,00	0,00	912.100,00	0,00	16.816.939,00	17.891.039,00	0,00	0,00	17.891.039,00
9	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SLBN 1 Tanjungpinang	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SLBN 2 Tanjungpinang	60.000,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	69.920,00	0,00	0,00	69.920,00
11	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SLBN Batam	2.910.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	2.982.000,00	0,00	0,00	2.982.000,00
12	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SLBN Karimun	640.000,00	0,00	888.600,00	0,00	0,00	1.528.600,00	0,00	0,00	1.528.600,00
13	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SLBN Kundur	80.000,00	0,00	107.440,00	0,00	0,00	187.440,00	0,00	0,00	187.440,00
14	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Palmatak	115.000,00	0,00	94.500,00	0,00	5.062.326,00	5.271.826,00	0,00	0,00	5.271.826,00
15	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Tanjungpinang	337.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	352.500,00	0,00	0,00	352.500,00

NO	SKPD	PPh21	PPh22	PPh23	PPh Ps 4 (2)	PPN	JUMLAH PFK 2025	JASA GIRO	BANTUAN BIAYA PERSONIL	SALDO KAS LAINNYA 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(3+4+5+6+7)*	*9*	*10*	*11= 8 + 9+10*
16	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 2 Tanjungpinang	3.129.500,00	0,00	450.760,00	0,00	11.722.758,00	15.303.018,00	0,00	0,00	15.303.018,00
17	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Bintan Timur	2.624.280,00	0,00	1.042.368,00	0,00	0,00	3.666.648,00	0,00	0,00	3.666.648,00
18	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Bunguran Barat	0,00	0,00	740.200,00	0,00	10.212.054,00	10.952.254,00	0,00	0,00	10.952.254,00
19	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Mantang	0,00	0,00	0,00	0,00	316.443,00	316.443,00	0,00	0,00	316.443,00
20	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Pulau Tiga Barat	30.000,00	0,00	244.800,00	0,00	1.444.863,00	1.719.663,00	0,00	0,00	1.719.663,00
21	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Siantan Timur	115.000,00	0,00	94.500,00	0,00	5.062.326,00	5.271.826,00	0,00	0,00	5.271.826,00
22	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Singkep	0,00	0,00	2.202.800,00	0,00	21.033.388,00	23.236.188,00	0,00	0,00	23.236.188,00
23	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Singkep Selatan	1.035.000,00	0,00	733.680,00	0,00	0,00	1.768.680,00	0,00	0,00	1.768.680,00
24	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Ungar	0,00	0,00	0,00	0,00	346.846,00	346.846,00	0,00	0,00	346.846,00
25	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 17 Batam	1.687.000,00	0,00	2.632.550,00	0,00	0,00	4.319.550,00	0,00	0,00	4.319.550,00
26	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 25 Batam	1.739.500,00	0,00	1.261.948,00	0,00	0,00	3.001.448,00	0,00	0,00	3.001.448,00
27	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 26 Batam	1.942.400,00	0,00	533.600,00	0,00	0,00	2.476.000,00	0,00	0,00	2.476.000,00
28	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 28 Batam	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
29	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 3 Kundur	870.000,00	0,00	762.485,00	0,00	2.544.732,00	4.177.217,00	0,00	0,00	4.177.217,00
30	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 8 Batam	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
31	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMKN 1 Batam	0,00	0,00	1.014.529,00	0,00	0,00	1.014.529,00	0,00	0,00	1.014.529,00

NO	SKPD	PPh21	PPh22	PPh23	PPh Ps 4 (2)	PPN	JUMLAH PFK 2025	JASA GIRO	BANTUAN BIAYA PERSONIL	SALDO KAS LAINNYA 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(3+4+5+6+7)*	*9*	*10*	*11= 8 + 9+10*
32	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMKN 1 SKL	615.000,00	0,00	205.920,00	0,00	0,00	820.920,00	0,00	0,00	820.920,00
33	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMKN 2 Batam	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
34	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMKN 7 Batam	100.000,00	0,00	115.300,00	0,00	0,00	215.300,00	0,00	0,00	215.300,00
35	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMKN Kundur Utara	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
36	Dinas Pendidikan (Bantuan Biaya Personil Peserta Didik SMK) SMKN 2 Anambas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	3.930.000,00	3.930.013,00
37	Dinas Pendidikan (Bantuan Biaya Personil Peserta Didik SMK) Bantuan Transportasi Laut SMKN Kundur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.089,00	0,00	15.089,00
38	Dinas Pendidikan (Bantuan Biaya Personil Peserta Didik SMK) DS SMK Negeri Kundur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.045,00	0,00	11.045,00
39	Dinas Pendidikan (Bantuan Biaya Personil Peserta Didik SMK) SMKN 1 Bunguran Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.839,00	0,00	28.839,00
40	Dinas Pendidikan (Bantuan Biaya Personil Peserta Didik SMK) SMKN 2 Bunguran Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739,00	34.320.000,00	34.325.739,00
41	Dinas Pendidikan (Bantuan Biaya Personil Peserta Didik SMK) SMKN 2 Bunguran Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,00	0,00	3.178,00
42	Dinas Pendidikan (Bantuan Biaya Personil Peserta Didik SMK) SMKN 1 Bunguran Timur Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	1.970.000,00	1.974.550,00
43	Dinas Pendidikan (Bantuan Biaya Personil Peserta Didik SMK) SMKN 1 Senayang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.959,00	1.027.600,00	1.048.559,00

NO	SKPD	PPh21	PPh22	PPh23	PPh Ps 4 (2)	PPN	JUMLAH PFK 2025	JASA GIRO	BANTUAN BIAYA PERSONIL	SALDO KAS LAINNYA 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(3+4+5+6+7)*	*9*	*10*	*11= 8 + 9+10*
44	Dinas Pendidikan (Bantuan Biaya Personil Peserta Didik SMK) SMKN 2 Lingga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438,00	3.024.000,00	3.030.438,00
45	Dinas Pendidikan (Bantuan Biaya Personil Peserta Didik SMK) SMKN 3 Anambas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	11.421.900,00	11.421.906,00
46	Dinas Pendidikan (BLUD) SMKN 1 Singkep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.792.000,00	16.792.000,00
47	Dinas Pendidikan (BLUD) SMKN Kundur Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.405.600,00	18.405.600,00
48	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (BLUD)	0,00	314.250,00	0,00	0,00	0,00	314.250,00	0,00	0,00	314.250,00
	JUMLAH	**18.354.680,00**	**314.250,00**	**14.868.956,00**	**0,00**	**76.762.356,00**	**110.300.242,00**	**520.089,00**	**90.891.100,00**	**201.711.431,00**

Selain itu terdapat saldo sebesar Rp6.462.033,00 yang berada pada beberapa rekening sekolah penerima Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang tidak termasuk bagian dari saldo Kas Lainnya. Saldo tersebut merupakan sisa kas atas transaksi tahun-tahun sebelumnya dan tidak diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.158 Rekapitulasi Sisa Kas yang tidak termasuk bagian dari Kas Lainnya

NO	NAMA SEKOLAH	SISA KAS
1	SMK Negeri 2 Anambas	332.218,00
2	SMK Negeri Kundur	100.000,00
3	SMK Negeri 1 Bunguran Barat	155.778,00
4	SMK Negeri 2 Bunguran Barat	139.537,00
5	SMK Negeri 2 Bunguran Timur	100.000,00
6	SMK Negeri 1 Bunguran Timur Laut	162.579,00
7	SMK Negeri 1 Senayang	182.667,00
8	SMK Negeri 2 Lingga	171.915,00
9	SMK Negeri 1 Gunung Kijang	100.000,00
10	SMK Negeri 1 Anambas	328.911,00
11	SMK Negeri 3 Anambas	334.828,00
12	SMKN 1 Bintan Utara	4.132.800,00
13	SMKN Kundur Utara	220.800,00
		6.462.033,00

7.5.3.1.1.5 Kas Dana BOSP

Kas Dana BOSP	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	1.986.989.519,00	**1.699.060.482,84**

Kas Dana BOSP digunakan untuk mencatat nilai akumulasi dari total dana BOSP yang berada pada rekening sekolah yang merupakan sisa dana BOSP yang belum dibelanjakan. Pada tahun 2024, Kas Dana BOSP disajikan pada kode akun objek 1.1.01.05 dengan uraian akun objek Kas Dana BOS berikut rincian objek beserta sub rincian objeknya. Selanjutnya pada tahun 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana akun tersebut dimutakhirkan menjadi kode akun objek 1.1.01.10 dengan uraian akun objek Kas Dana BOSP berikut rincian objek beserta sub rincian objeknya.

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan riau mencatat saldo Kas Dana BOSP sebesar Rp1.986.989.519,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.159 Rekapitulasi Kas di Bendahara BOS SMAN/SMKN/SLBN Per 31 Desember 2025

NO	NSPN	NAMA SEKOLAH	SISA KAS DI SEKOLAH		
			Tunai	Kas di Bank (Rekening Koran 31 Desember 2025)	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(4+5)*
1	11002044	SMAN 1 JEMAJA	0,00	0,00	0,00
2	11002046	SMAN 1 PALMATAK	0,00	0,00	0,00
3	11000321	SMAN 1 SIANTAN	0,00	0,00	0,00
4	11002506	SMAN 1 SIANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00
5	69859728	SMAN 1 Siantan Utara	0,00	0,00	0,00
6	11002484	SMAN 1 BINTAN PESISIR	0,00	0,00	0,00
7	11002255	SMAN 1 BINTAN TIMUR	118.347,00	19.321.942,00	19.440.289,00
8	11002256	SMAN 1 BINTAN UTARA	0,00	0,00	0,00
9	69854725	SMAN 1 MANTANG	0,00	0,00	0,00
10	11002258	SMAN 1 TAMBELAN	100.000,00	50.000,00	150.000,00
11	11002259	SMAN 1 TELUK BINTAN	0,00	0,00	0,00
12	11002260	SMAN 1 TELUK SEBONG	0,00	0,00	0,00
13	11002257	SMAN 1 TOAPAYA	0,00	0,00	0,00
14	69953268	SMAN 2 BINTAN PESISIR	0,00	0,00	0,00
15	69963195	SMAN 2 TELUK BINTAN	191.095,00	0,00	191.095,00
16	11002518	SMAN 1 Belat	0,00	0,00	0,00
17	11002025	SMAN 1 BURU	0,00	0,00	0,00
18	11002026	SMAN 1 DURAI	0,00	0,00	0,00
19	11000240	SMAN 1 KARIMUN	0,00	0,00	0,00
20	11000241	SMAN 1 KUNDUR	0,00	500,00	500,00
21	11000224	SMAN 1 MORO	1.880.378,00	85.458.807,00	87.339.185,00
22	11003223	SMAN 1 Sugie Besar	0,00	0,00	0,00
23	11002031	SMAN 1 Ungar	119.600,00	400,00	120.000,00
24	11000223	SMAN 2 KARIMUN	0,00	0,00	0,00
25	11000221	SMAN 2 KUNDUR	22.578.372,00	0,00	22.578.372,00
26	11002027	SMAN 3 KARIMUN	0,00	0,00	0,00
27	11002028	SMAN 3 KUNDUR	0,00	0,00	0,00
28	11002029	SMAN 4 KARIMUN	0,00	0,00	0,00
29	11002030	SMAN 4 KUNDUR	0,00	0,00	0,00
30	69989323	SMAN 5 KARIMUN	0,00	0,00	0,00
31	70048478	SMA NEGERI 1 SELAT GELAM	0,00	0,00	0,00
32	11003247	SMAN 1 Bakung Serumpun	0,00	0,00	0,00
33	11002813	SMAN 1 Katang Bidare	0,00	0,00	0,00
34	69980031	SMAN 1 KEPULAUAN POSEK	0,00	0,00	0,00
35	11002067	SMAN 1 LINGGA	340,00	127.999.662,00	128.000.002,00
36	11003246	SMAN 1 Lingga Timur	0,00	11.883,00	11.883,00
37	11002068	SMAN 1 LINGGA UTARA	128.693.500,00	0,00	128.693.500,00
38	11003243	SMAN 1 Selayar	0,00	0,00	0,00
39	11002069	SMAN 1 SENAYANG	0,00	0,00	0,00

NO	NSPN	NAMA SEKOLAH	SISA KAS DI SEKOLAH		
			Tunai	Kas di Bank (Rekening Koran 31 Desember 2025)	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(4+5)*
40	11002070	SMAN 1 SINGKEP	1.920,00	0,00	1.920,00
41	11002071	SMAN 1 SINGKEP BARAT	0,00	0,00	0,00
42	69979502	SMAN 1 SINGKEP PESISIR	0,00	0,00	0,00
43	69965911	SMAN 1 SINGKEP SELATAN	0,00	0,00	0,00
44	60725467	SMAN 1 Temiang Pesisir	0,00	0,00	0,00
45	11002072	SMAN 2 SINGKEP	0,00	0,00	0,00
46	70048494	SMA NEGERI 2 BAKUNG SERUMPUN	0,00	0,00	0,00
47	11002450	SMAN 1 Batubi	0,00	0,00	0,00
48	11002042	SMAN 1 BUNGURAN BARAT	0,00	0,00	0,00
49	11002499	SMAN 1 BUNGURAN SELATAN	0,00	0,00	0,00
50	69762629	SMAN 1 BUNGURAN TENGAH	0,00	0,00	0,00
51	11000322	SMAN 1 BUNGURAN TIMUR	0,00	0,00	0,00
52	11002778	SMAN 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	0,00	0,00	0,00
53	11002043	SMAN 1 BUNGURAN UTARA	0,00	0,00	0,00
54	11002045	SMAN 1 MIDAI	0,00	0,00	0,00
55	11002051	SMAN 1 PULAU LAUT	0,00	0,00	0,00
56	11002050	SMAN 1 Pulau Tiga Barat	0,00	0,00	0,00
57	11002047	SMAN 1 SERASAN	0,00	0,00	0,00
58	11003053	SMAN 1 SERASAN TIMUR	0,00	28.222,00	28.222,00
59	11002048	SMAN 1 SUBI	0,00	0,00	0,00
60	11002049	SMAN 2 BUNGURAN TIMUR	800.000,00	0,00	800.000,00
61	70048467	SMA NEGERI 1 SELUAN	0,00	0,00	0,00
62	11002194	SMAN 10 BATAM	0,00	7.568.000,00	7.568.000,00
63	11002195	SMAN 11 BATAM	0,00	0,00	0,00
64	11002196	SMAN 12 BATAM	6.753.241,00	282.850.384,00	289.603.625,00
65	11002455	SMAN 13 BATAM	0,00	0,00	0,00
66	11002457	SMAN 14 BATAM	4.438.635,00	117.488.200,00	121.926.835,00
67	11002458	SMAN 15 BATAM	0,00	0,00	0,00
68	60728418	SMAN 16 BATAM	17.658.868,00	152.982.967,00	170.641.835,00
69	60728419	SMAN 17 BATAM	0,00	0,00	0,00
70	69863917	SMAN 18 Batam	0,00	0,00	0,00
71	69872144	SMAN 19 BATAM	2.132.550,00	106.008.090,00	108.140.640,00
72	11000360	SMAN 1 BATAM	3.356.692,00	81.964.036,00	85.320.728,00
73	69915799	SMAN 20 BATAM	0,00	1.410.024,00	1.410.024,00
74	69915801	SMAN 21 BATAM	0,00	0,00	0,00
75	69968298	SMAN 22 BATAM	0,00	26.100,00	26.100,00
76	69980500	SMAN 23 BATAM	5.970.993,00	160.571.426,00	166.542.419,00
77	69980503	SMAN 24 BATAM	0,00	0,00	0,00
78	69990471	SMAN 25 BATAM	0,00	0,00	0,00

NO	NSPN	NAMA SEKOLAH	SISA KAS DI SEKOLAH		
			Tunai	Kas di Bank (Rekening Koran 31 Desember 2025)	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(4+5)*
79	69990472	SMAN 26 BATAM	0,00	0,00	0,00
80	70012279	SMAN 27 BATAM	0,00	0,00	0,00
81	70012280	SMAN 28 BATAM	0,00	0,00	0,00
82	11000359	SMAN 2 BATAM	3.501.129,00	150.266.268,00	153.767.397,00
83	11002197	SMAN 3 BATAM	0,00	0,00	0,00
84	11002198	SMAN 4 BATAM	0,00	23.411.602,00	23.411.602,00
85	11002199	SMAN 5 BATAM	1.049.500,00	20.031.300,00	21.080.800,00
86	11002200	SMAN 6 BATAM	28.333.556,00	0,00	28.333.556,00
87	11002201	SMAN 7 BATAM	0,00	0,00	0,00
88	11002202	SMAN 8 BATAM	7.861.376,00	171.616.708,00	179.478.084,00
89	11002203	SMAN 9 BATAM	0,00	0,00	0,00
90	70048466	SMA NEGERI 29 BATAM	0,00	119,00	119,00
91	11000433	SMAN 1 TANJUNG PINANG	0,00	0,00	0,00
92	11000434	SMAN 2 TANJUNG PINANG	0,00	0,00	0,00
93	11000435	SMAN 3 TANJUNG PINANG	0,00	127.575.000,00	127.575.000,00
94	11000436	SMAN 4 TANJUNG PINANG	0,00	0,00	0,00
95	11000437	SMAN 5 TANJUNG PINANG	0,00	0,00	0,00
96	11001975	SMAN 6 TANJUNG PINANG	0,00	0,00	0,00
97	69971073	SMAN 7 TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00
98	11003192	SMKN 1 ANAMBAS	0,00	0,00	0,00
99	69859732	SMKN 2 ANAMBAS	0,00	0,00	0,00
100	69859733	SMKN 3 ANAMBAS	0,00	0,00	0,00
101	69973863	SMK NEGERI 4 ANAMBAS	0,00	0,00	0,00
102	11002481	SMKN 1 BINTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00
103	11002263	SMKN 1 BINTAN UTARA	38.263.491,00	0,00	38.263.491,00
104	11003305	SMKN 1 GUNUNG KIJANG	0,00	0,00	0,00
105	69854734	SMKN 1 SERI KUALA LOBAM	1.516.900,00	0,00	1.516.900,00
106	11002143	SMKN 1 KARIMUN	0,00	0,00	0,00
107	11002144	SMKN 1 MORO	0,00	0,00	0,00
108	69864705	SMK NEGERI 2 KARIMUN	16.349.400,00	0,00	16.349.400,00
109	69960641	SMK NEGERI KUNDUR UTARA	0,00	0,00	0,00
110	11002580	SMKN KUNDUR	403.728,00	0,00	403.728,00
111	11003241	SMKN 1 LINGGA	0,00	0,00	0,00
112	11002073	SMKN 1 SENAYANG	0,00	0,00	0,00
113	11002814	SMKN 1 SINGKEP	278.865,00	32.782.472,00	33.061.337,00
114	60725422	SMKN 2 LINGGA	4.180,00	100.000,00	104.180,00
115	11000320	SMKN 1 BUNGURAN BARAT	0,00	0,00	0,00
116	11002052	SMKN 1 BUNGURAN TIMUR	0,00	0,00	0,00
117	11003175	SMKN 2 BUNGURAN BARAT	12.978.000,00	0,00	12.978.000,00

NO	NSPN	NAMA SEKOLAH	SISA KAS DI SEKOLAH		
			Tunai	Kas di Bank (Rekening Koran 31 Desember 2025)	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(4+5)*
118	69974105	SMK NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	0,00	0,00	0,00
119	69988626	SMK NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR	0,00	10.410.000,00	10.410.000,00
120	11000382	SMKN 1 BATAM	0,00	0,00	0,00
121	11002210	SMKN 2 BATAM	0,00	0,00	0,00
122	11002570	SMKN 3 BATAM	0,00	0,00	0,00
123	11002571	SMKN 4 BATAM	0,00	0,00	0,00
124	11003006	SMKN 5 BATAM	0,00	0,00	0,00
125	11003158	SMKN 6 BATAM	0,00	0,00	0,00
126	69774885	SMKN 7 BATAM	0,00	0,00	0,00
127	70011450	SMKN 9 BATAM	0,00	0,00	0,00
128	70048098	SMK NEGERI 10 BATAM	0,00	0,00	0,00
129	70048190	SMK NEGERI 11 BATAM	0,00	0,00	0,00
130	69974383	SMK NEGERI 8 BATAM	0,00	0,00	0,00
131	11000438	SMKN 1 TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00
132	11000439	SMKN 2 TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00
133	11000426	SMKN 3 TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00
134	11002495	SMKN 4 TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00
135	69973762	SMK NEGERI 5 TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00
136	70009388	SLBN ANAMBAS	0,00	0,00	0,00
137	69786958	SLB NEGERI BINTAN	0,00	13.251,00	13.251,00
138	70012135	SLBN KIJANG	0,00	0,00	0,00
139	11002434	SLB NEGERI KARIMUN	0,00	0,00	0,00
140	69972050	SLB NEGERI KUNDUR	0,00	0,00	0,00
141	69972874	SLB NEGERI LINGGA	0,00	0,00	0,00
142	69983759	SLB NEGERI NATUNA	0,00	0,00	0,00
143	69786956	SLB NEGERI BATAM	1.707.222,00	278,00	1.707.500,00
144	11002369	SLBN 1 TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00
145	69932219	SLBN 2 TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00
JUMLAH			**307.041.878,00**	**1.679.947.641,00**	**1.986.989.519,00**

7.5.3.1.1.6 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	15.748.913.159,68	**99.618.122.631,00**

Merupakan piutang yang timbul dari pajak daerah yang belum diterima di Kas Daerah sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang pajak daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp15.748.913.159,68 yang terdiri dari piutang pajak atas Pajak Kendaraan

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, dan Pajak Air Permukaan yang tercatat dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah. Rincian Piutang Pajak Daerah diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 7.5.160 Rekapitulasi Saldo Akhir Piutang Pajak Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2025

No	Uraian	Saldo Awal 2025	Koreksi		Pelunasan Saldo Awal	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2025			Saldo Akhir 2025
			Tambah	Kurang		Penetapan	Pengurangan	Diskon Pajak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=2+4-5-6+7-8-9
	TOTAL PIUTANG	**99.618.122.631,00**	**993.392.798,68**	**464.321.053,00**	**85.158.832.017,00**	**1.142.595.948.471,00**	**1.117.022.581.689,00**	**24.812.815.982,00**	**15.748.913.159,68**
I	**SKPDKB**	**4.959.226.094,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.959.226.094,00**
	PKB	1.007.790.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.790.974,00
	BBNKB	3.951.435.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951.435.120,00
II	**Pokok PKB dan BBN-KB**	**22.834.002.867,00**	**0,00**	**95.300.400,00**	**13.702.959.000,00**	**690.658.827.973,00**	**665.085.461.191,00**	**24.812.815.982,00**	**9.796.294.267,00**
A	**PKB**	**9.876.532.367,00**	**0,00**	**86.734.800,00**	**1.873.829.000,00**	**419.717.729.073,00**	**403.433.853.591,00**	**16.179.020.982,00**	**8.020.823.067,00**
1	BATAM	8.864.959.567,00	0,00	76.477.100,00	1.806.046.700,00	330.915.181.036,00	319.299.714.867,00	11.514.705.569,00	7.083.196.367,00
2	TANJUNGPINANG	452.166.675,00	0,00	8.863.200,00	10.901.800,00	42.997.296.945,00	40.889.694.550,00	2.107.602.395,00	432.401.675,00
4	BINTAN	120.320.600,00	0,00	67.000,00	30.066.000,00	18.906.064.351,00	17.854.471.147,00	1.051.593.204,00	90.187.600,00
3	KARIMUN	300.180.375,00	0,00	799.500,00	0,00	21.264.898.046,00	20.127.651.017,00	1.137.247.029,00	299.380.875,00
5	LINGGA	16.556.800,00	0,00	0,00	0,00	2.325.768.609,00	2.205.857.563,00	119.911.046,00	16.556.800,00
6	NATUNA	122.348.350,00	0,00	528.000,00	26.814.500,00	2.954.704.095,00	2.726.727.597,00	223.882.598,00	99.099.750,00
7	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	353.815.991,00	329.736.850,00	24.079.141,00	0,00
B	**BBNKB**	**12.957.470.500,00**	**0,00**	**8.565.600,00**	**11.829.130.000,00**	**270.941.098.900,00**	**261.651.607.600,00**	**8.633.795.000,00**	**1.775.471.200,00**
1	BATAM	12.193.882.000,00	0,00	853.600,00	11.392.560.000,00	238.156.686.600,00	231.207.112.900,00	6.321.366.900,00	1.428.675.200,00
2	TANJUNGPINANG	210.532.000,00	0,00	4.100.000,00	55.700.000,00	13.382.363.100,00	12.419.967.300,00	962.395.800,00	150.732.000,00
4	BINTAN	266.740.000,00	0,00	0,00	199.660.000,00	9.434.171.400,00	8.889.331.600,00	544.839.800,00	67.080.000,00
3	KARIMUN	36.303.700,00	0,00	92.000,00	0,00	7.752.241.400,00	7.052.619.400,00	699.622.000,00	36.211.700,00
5	LINGGA	6.791.000,00	0,00	0,00	0,00	901.711.200,00	872.300.900,00	29.410.300,00	6.791.000,00
6	NATUNA	243.221.800,00	0,00	3.520.000,00	181.210.000,00	1.102.191.100,00	1.005.798.100,00	68.903.500,00	85.981.300,00
7	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	211.734.100,00	204.477.400,00	7.256.700,00	0,00
III	**PBBKB**	**39.688.597.082,00**	**227.908.858,43**	**0,00**	**39.688.597.082,00**	**450.061.566.595,00**	**450.061.566.595,00**	**0,00**	**227.908.858,43**
	PBBKB	39.688.597.082,00	227.908.858,43	0,00	39.688.597.082,00	450.061.566.595,00	450.061.566.595,00	0,00	227.908.858,43
IV	**PAJAK ALAT BERAT**	**0,00**	**303.715.000,00**	**0,00**	**0,00**	**614.336.352,00**	**614.336.352,00**	**0,00**	**303.715.000,00**

No	Uraian	Saldo Awal 2025	Koreksi		Pelunasan Saldo Awal	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2025			Saldo Akhir 2025
			Tambah	Kurang		Penetapan	Pengurangan	Diskon Pajak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=2+4-5-6+7-8-9
	PAJAK ALAT BERAT	0,00	303.715.000,00	0,00	0,00	614.336.352,00	614.336.352,00	0,00	303.715.000,00
V	**AIR PERMUKAAN**	**32.136.296.588,00**	**461.768.940,25**	**369.020.653,00**	**31.767.275.935,00**	**1.261.217.551,00**	**1.261.217.551,00**	**0,00**	**461.768.940,25**
1	BATAM	32.124.985.178,00	12.000.000,25	369.020.653,00	31.755.964.525,00	958.195.014,00	958.195.014,00	0,00	12.000.000,25
2	TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00	0,00	18.592.825,00	18.592.825,00	0,00	0,00
3	BINTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	111.475.420,00	111.475.420,00	0,00	0,00
4	KIJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	51.294.744,00	51.294.744,00	0,00	0,00
5	KARIMUN	0,00	449.768.940,00	0,00	0,00	22.661.050,00	22.661.050,00	0,00	449.768.940,00
6	TANJUNG BATU	0,00	0,00	0,00	0,00	20.802.124,00	20.802.124,00	0,00	0,00
7	LINGGA	11.311.410,00	0,00	0,00	11.311.410,00	46.828.308,00	46.828.308,00	0,00	0,00
8	NATUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.562.846,00	28.562.846,00	0,00	0,00
9	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805.220,00	2.805.220,00	0,00	0,00

7.5.3.1.1.7 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	4.490.691.222,00	**11.437.716.976,00**

Merupakan piutang yang digunakan untuk mencatat pungutan daerah otonom sebagai pembayaran daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya namun belum diterima pembayaran dari wajib retribusi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.490.691.222,00 terdiri dari Piutang Jasa Umum sebesar Rp4.219.992.869,00 dan Piutang Jasa Usaha sebesar Rp270.698.353,00.

Berikut rincian Piutang Retribusi Daerah dijelaskan sebagai berikut:

1) Piutang Jasa Umum

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Piutang Jasa Umum per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.219.992.869,00 terdiri dari Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp139.720.397,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp4.080.272.472,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.161 Rekapitulasi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO AWAL PIUTANG	KOREKSI	PELUNASAN	MUTASI PIUTANG TAHUN 2025		SALDO AKHIR PIUTANG
					PENETAPAN	PELUNASAN	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5+6-7
1	BPJS KESEHATAN	23.086.000,00	0,00	23.086.000,00	18.171.862.271,00	18.171.862.271,00	0,00
2	BPJS KETENAGAKERJAAN	0,00	0,00	0,00	129.811.100,00	129.811.100,00	0,00
3	YOSHIKAWA	0,00	0,00	0,00	597.430,00	597.430,00	0,00
4	JAMKESDA BINTAN	0,00	0,00	0,00	146.967.483,00	146.967.483,00	0,00
5	JASA RAHARJA	0,00	0,00	0,00	53.316.791,00	51.657.061,00	1.659.730,00
6	BALMON	0,00	0,00	0,00	38.108.108,00	38.108.108,00	0,00
7	SEWA ATM	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
8	SEWA LAHAN	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
9	JAMKESDA PROVINSI	0,00	0,00	0,00	201.909.900,00	135.287.700,00	66.622.200,00
10	DP3KB	0,00	0,00	0,00	13.258.597,00	13.258.597,00	0,00
11	PT INHEALTH	18.353.935,00	0,00	18.353.935,00	19.407.142,00	18.819.342,00	587.800,00
12	TCM/GLOBAL FUND	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	34.945.000,00	29.425.000,00	5.520.000,00
13	PP ALILA VILLA	843.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.900,00
14	PP CONDOTEL	6.285.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.285.100,00
15	HUTAMA KARYA	13.102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.102.500,00
16	BINTAN LAGOON	7.153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.153.500,00
17	PERTAMINA	48.929.030,00	0,00	48.929.030,00	84.475.060,00	51.230.614,00	33.244.446,00
18	TASPEN	360.721,00	0,00	0,00	3.646.396,00	3.646.396,00	360.721,00
19	INDEMNITY	4.836.601,00	0,00	4.836.601,00	673.114,00	673.114,00	0,00
20	AMODA	21.670.500,00	0,00	21.670.500,00	14.637.000,00	10.296.500,00	4.340.500,00

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO AWAL PIUTANG	KOREKSI	PELUNASAN	MUTASI PIUTANG TAHUN 2025		SALDO AKHIR PIUTANG
					PENETAPAN	PELUNASAN	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5+6-7
21	KEMENKES	185.897.966,00	(39.000,00)	185.858.966,00	0,00	0,00	0,00
Total		**333.469.753,00**	**(39.000,00)**	**305.685.032,00**	**18.957.115.392,00**	**18.845.140.716,00**	**139.720.397,00**

Tabel 7.5.162 Rekapitulasi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO AWAL PIUTANG	KOREKSI SALDO AWAL		PELUNASAN	MUTASI PIUTANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR PIUTANG
			Tambah	Kurang		Penetapan	Pelunasan	
1	2	3	4	5	6	7	8	10=3+4-5-6+7-8
1	JKN / BPJS KESEHATAN	7.264.242.025,00	0,00	30.000,00	7.264.212.025,00	116.438.622.133,00	116.382.812.133,00	55.810.000,00
2	JKN PARSIAL RSUD KOTA TPI	0,00	0,00	0,00	0,00	315.976.209,00	285.764.209,00	30.212.000,00
3	JKN PARSIAL RSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.833.000,00	13.833.000,00	0,00
4	JKN PARSIAL RSUD KAB. BINTAN (KIJANG)	0,00	0,00	0,00	0,00	120.747.727,00	120.747.727,00	0,00
5	JAMKESDA KOTA TPI	0,00	0,00	0,00	0,00	596.572.500,00	596.572.500,00	0,00
6	JAMKESDA PROV. KEPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	836.651.300,00	529.148.300,00	307.503.000,00
7	RUJUKAN KOTA TPI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752.000,00	3.752.000,00	0,00
8	PT. BRC	0,00	0,00	0,00	0,00	10.377.053,00	7.523.103,00	2.853.950,00
9	BPJS KETENAGAKERJAAN	254.466.750,00	0,00	5.800,00	254.460.950,00	3.791.950.491,00	3.410.703.616,00	381.246.875,00
10	IOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PT. INHEALTH INDONESIA	156.500.881,00	0,00	368.000,00	156.132.881,00	292.406.051,00	278.258.352,00	14.147.699,00
12	PT. LINTAS SUKAPURA MANDIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	JKD KAB. BINTAN	18.598.350,00	0,00	0,00	18.598.350,00	278.255.051,00	278.255.051,00	0,00
14	TASPEN	38.981.100,00	0,00	0,00	38.981.100,00	284.689.525,00	238.836.375,00	45.853.150,00
15	KEMENKES (TKI DEPORTASI)	16.646.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.646.988,00
16	KIMIA FARMA	9.010.000,00	0,00	0,00	9.010.000,00	33.389.200,00	19.409.200,00	13.980.000,00
17	GLOBAL FUND (TB MDR)	14.245.696,00	0,00	0,00	14.245.696,00	47.101.152,00	47.101.152,00	0,00
18	PARSIAL RSUD EHD	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	107.830.350,00	107.830.350,00	0,00
19	AIRNAV	0,00	0,00	0,00	0,00	16.473.500,00	7.302.900,00	9.170.600,00
20	PT. JASA RAHARJA	147.886.523,00	0,00	0,00	147.886.523,00	2.414.632.008,00	2.304.455.208,00	110.176.800,00
21	BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BAWASLU PROVINSI KEPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BANK RIAU KEPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	21.109.050,00	21.109.050,00	0,00
24	PT. MEITECH	296.256.150,00	0,00	0,00	296.256.150,00	1.307.709.600,00	885.803.600,00	421.906.000,00
25	PT. NAYAKA ERA HUSADA	3.757.400,00	0,00	7.500,00	3.749.900,00	50.155.300,00	48.269.600,00	1.885.700,00
26	RRI TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DPRD KABUPATEN BINTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	45.689.064,00	45.689.064,00	0,00
28	PT. PELINDO I	7.868.250,00	0,00	12.500,00	7.855.750,00	18.952.700,00	17.766.350,00	1.186.350,00
29	PPPAPM KOTA TPI	0,00	0,00	0,00	0,00	74.404.150,00	74.404.150,00	0,00
30	BIRO KLASIFIKASI INDONESIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	DINAS PPKB (MOW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	UNHCR	0,00	0,00	0,00	0,00	72.128.000,00	72.128.000,00	0,00
33	PT. ANGKASA PURA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.038.257,00	19.038.257,00	0,00
34	RUJUKAN RSUD BINTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	15.696.250,00	15.696.250,00	0,00
35	KPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	PASIEN UMUM	2.661.259.910,00	0,00	0,00	0,00	11.013.500,00	4.580.050,00	2.667.693.360,00
		10.896.320.023,00	**0,00**	**423.800,00**	**8.217.989.325,00**	**127.239.155.121,00**	**125.836.789.547,00**	**4.080.272.472,00**

2) Piutang Retribusi Jasa Usaha

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Piutang Retribusi Jasa Usaha per 31 Desember 2025 sebesar Rp270.698.353,00. Piutang Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium yang tercatat dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp123.955.500,00 dan Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan yang tercatat dan dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp106.415.392,00 serta Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang tercatat dan dikelola oleh Dinas Perhubungan sebesar Rp40.327.461,00.

Tabel 7.5.163 Rekapitulasi Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

No	Nama Wajib Retribusi	Jumlah Piutang
1	CV. AIR BUNGA	4.602.500,00
2	CV. ANAK TAMIANG	7.376.500,00
3	CV. BAHANA ROBAT	10.680.000,00
4	CV. CITRA BUMI LOSARI	450.000,00
5	CV. INDOCO	4.602.500,00
6	CV. KARYA CIPTA UTAMA	600.000,00
7	CV. MATA AIR	3.802.500,00
8	CV. MENARA ADI JAYA	450.000,00
9	CV. NICHA BINTAN	3.000.000,00
10	CV. PORMULA JAYA	2.400.000,00
11	CV. SAMUDERA JAYA PERKASA	1.000.000,00
12	CV. SINAR NUSANTARA IMPLEMENTASI	1.200.000,00
13	CV. TANJUNG PUTRI MANDIRI	3.302.500,00
14	CV. TRI BUANA CITRA PERKASA	6.772.500,00
15	PT. BENTAN SONDONG	30.950.000,00
16	PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA-PT.MINARTA DUTAHUTAMA,KSO	1.698.000,00
17	PT. MAJU BERSAMA JAYA	732.000,00
18	PT. MIRA	10.907.500,00
19	PT. NATHANS MULIA MANDIRI	1.500.000,00
20	PT. PANDJI BANGUN PERSADA	19.963.500,00
21	PT. PULAU SAMOSIR SAKTI PERKASA	4.515.500,00
22	PT. SUMBER ARTHA REKSA MULIA	150.000,00
23	PT. TIARA INDOPENTA,KSO	3.000.000,00
24	PT. YUDHA PERKASA UTAMA	300.000,00
	Total	**123.955.500,00**

Tabel 7.5.164 Rekapitulasi Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO AWAL PIUTANG	KOREKSI SALDO AWAL		PELUNASAN	MUTASI PIUTANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR PIUTANG
			Tambah	Kurang		Penetapan	Pelunasan	
1	2	3	4	5	6	7	8	10=3+4-5-6+7-8
1	SEWA LOKET KIMIA FARMA	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO AWAL PIUTANG	KOREKSI SALDO AWAL		PELUNASAN	MUTASI PIUTANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR PIUTANG
			Tambah	Kurang		Penetapan	Pelunasan	
1	2	3	4	5	6	7	8	10=3+4-5-6+7-8
2	SEWA KANTIN RODIAH	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
3	SEWA KANTIN BU RINA	2.800.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
4	SEWA LAHAN LATASHA_EOADDICTED - YOUNG LIVING LESTARI	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00
5	KANTOR KAS BANK RIAU KEPRI SYARIAH	0,00	0,00	0,00	0,00	74.949.600,00	74.949.600,00	0,00
6	ATM BANK RIAU KEPRI SYARIAH	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
7	SEWA LAHAN DEWE MART LT.1 RSUD RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	36.304.000,00	19.152.000,00	17.152.000,00
8	SEWA LAHAN STAND KANTIN HENI LANTAI 2	0,00	0,00	0,00	0,00	8.515.200,00	8.515.200,00	0,00
9	SEWA LAHAN KDH UNTUNG SABUT (KOPI DARI HATI) - 2025	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	68.463.392,00	0,00	68.463.392,00
		44.554.000,00	**0,00**	**0,00**	**23.754.000,00**	**236.232.192,00**	**150.616.800,00**	**106.415.392,00**

Tabel 7.5.165 Rekapitulasi Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Dinas Perhubungan

NO	NAMA WAJIB RETRIBUSI	JUMLAH PIUTANG
1	Agen Tiket (Muhammad Ali)	342.000,00
2	ANDRI	342.000,00
3	PT. Tirta Bintan Abadi	727.400,00
4	Kedai Makan Sejahtera (Rosmawati)	300.000,00
5	Nicky Chandra	5.701.811,00
6	PT. Tuah Bainaura Perkasa	11.086.600,00
7	Tomy	1.139.650,00
8	PT. Lautan Karimun Manggala	75.625,00
9	PT. Cahaya Belawa Inhil	236.200,00
10	PT. Anugrah Jala Chandra	2.187.625,00
11	Apnal Jony	54.750,00
12	PT. Berkah Bandar Nusa	4.242.000,00
13	PT. ASDP Indonesia Cabang Batam	13.891.800,00
	Total	**40.327.461,00**

7.5.3.1.1.8 Piutang Lain – lain PAD Yang Sah

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	4.348.296.838,03	**18.180.173.021,32**

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada tahun 2025 sebesar Rp4.348.296.838,03 terdiri dari Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp84.864.864,84, Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp2.352.074.250,00, Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp1.596.316,00, dan Piutang Pendapatan dari Pengembalian sebesar

Rp1.904.218.463,19, serta Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp5.542.944,00. Berikut dibawah ini dijelaskan rincian Piutang Lain-lain PAD Yang sah antara lain:

1) Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	84.864.864,84	0,00

Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang belum dibayarkan. Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp84.864.864,84.

2) Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	2.352.074.250,00	18.157.290.883,12

Merupakan piutang pendapatan denda pajak yang timbul dari pajak daerah yang belum diterima di Kas Daerah sampai tanggal pelaporan. Piutang pendapatan denda pajak daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.352.074.250,00 dengan saldo awal piutang sebesar Rp18.157.290.883,12.

Piutang pendapatan denda pajak daerah yang dicatat serta dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari piutang denda pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat dan Pajak Air Permukaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah. Rincian piutang pendapatan denda pajak daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.166 Rekapitulasi Saldo Akhir Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2025

No	Uraian	Saldo Awal 2025	Koreksi		Pelunasan Saldo Awal	Mutasi Piutang Denda Pajak Tahun 2025			Saldo Akhir 2025
			tambah	kurang		Penetapan	Pengurangan	Diskon Denda Pajak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3+4-5-6+7-8-9
	TOTAL PIUTANG	**18.157.290.883,12**	**4.483.500,00**	**22.797.900,00**	**15.786.849.533,12**	**32.505.423.356,00**	**10.038.908.556,00**	**22.466.567.500,00**	**2.352.074.250,00**
I	**Denda Pokok PKB dan BBN-KB**	**2.374.821.850,00**	**4.483.500,00**	**22.797.900,00**	**4.380.500,00**	**32.413.817.900,00**	**9.947.303.100,00**	**22.466.567.500,00**	**2.352.074.250,00**
1	**DENDA PKB**	**2.350.255.650,00**	**1.645.600,00**	**22.730.500,00**	**1.592.900,00**	**32.413.817.900,00**	**9.947.303.100,00**	**22.466.567.500,00**	**2.327.525.150,00**
1	BATAM	2.142.773.885,00	243.600,00	21.617.300,00	236.100,00	24.466.974.300,00	7.931.810.900,00	16.535.170.900,00	2.121.156.585,00
2	TANJUNGPINANG	97.113.290,00	1.402.000,00	819.300,00	1.356.800,00	3.851.721.600,00	1.000.710.600,00	2.851.056.200,00	96.293.990,00
4	BINTAN	14.868.500,00	0,00	14.800,00	0,00	1.617.840.900,00	399.401.400,00	1.218.439.500,00	14.853.700,00
3	KARIMUN	70.423.750,00	0,00	279.100,00	0,00	1.963.308.100,00	518.033.300,00	1.445.274.800,00	70.144.650,00
5	LINGGA	5.088.525,00	0,00	0,00	0,00	186.043.500,00	51.177.000,00	134.866.500,00	5.088.525,00
6	NATUNA	19.987.700,00	0,00	0,00	0,00	288.164.300,00	38.424.100,00	249.740.200,00	19.987.700,00
7	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	39.765.200,00	7.745.800,00	32.019.400,00	0,00
II	**DENDA BBNKB**	**24.566.200,00**	**2.837.900,00**	**67.400,00**	**2.787.600,00**	0,00	0,00	0,00	**24.549.100,00**
1	BATAM	22.096.300,00	50.300,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.079.200,00
2	TANJUNGPINANG	1.085.300,00	2.787.600,00	0,00	2.787.600,00	0,00	0,00	0,00	1.085.300,00
4	BINTAN	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
3	KARIMUN	675.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.200,00
5	LINGGA	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
6	NATUNA	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00
8	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**DENDA PBBKB**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.312.431,00**	**91.312.431,00**	**0,00**	**0,00**
	Denda PBBKB	0,00	0,00	0,00	0,00	91.312.431,00	91.312.431,00	0,00	0,00
IV	**DENDA PAJAK ALAT BERAT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Denda Pajak Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Saldo Awal 2025	Koreksi		Pelunasan Saldo Awal	Mutasi Piutang Denda Pajak Tahun 2025			Saldo Akhir 2025
			tambah	kurang		Penetapan	Pengurangan	Diskon Denda Pajak	
V	**DENDA AIR PERMUKAAN**	**15.782.469.033,12**	**0,00**	**0,00**	**15.782.469.033,12**	**293.025,00**	**293.025,00**	0,00	0,00
1	BATAM	15.782.469.033,12	0,00	0,00	15.782.469.033,12	120.072,00	120.072,00	0,00	0,00
2	TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BINTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	31.020,00	31.020,00	0,00	0,00
4	KIJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	KARIMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	47.967,00	47.967,00	0,00	0,00
6	TANJUNG BATU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LINGGA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.454,00	22.454,00	0,00	0,00
8	NATUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	71.512,00	71.512,00	0,00	0,00
9	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	1.596.316,00	**1.157.138,00**

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah timbul dikarenakan Wajib Retribusi Daerah tidak memenuhi kewajiban sehingga dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp1.596.316,00 yang merupakan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang tercatat dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp667.200,00 dan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang tercatat dan dikelola oleh Dinas Perhubungan sebesar Rp929.116,00.

4) Piutang Pendapatan dari Pengembalian

Piutang Pendapatan dari Pengembalian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	1.904.218.463,19	**21.725.000,00**

Piutang Pendapatan dari Pengembalian digunakan pemerintah untuk mencatat hak tagih atau aset atas kelebihan pembayaran pada periode sebelumnya yang wajib dikembalikan oleh pihak penerima. Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo Piutang Pendapatan dari Pengembalian yang berasal dari hasil temuan oleh auditor pada tahun 2025 atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja modal yang sudah ditindaklanjuti sebesar Rp1.904.218.463,19.

Tabel 7.5.167 Piutang Pendapatan dari Pengembalian

No	Perangkat Daerah	Piutang Pendapatan dari Pengembalian				Jumlah
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Hibah	Belanja Modal	
1	Badan Kepegawaian dan KORPRI	1.474.040,00	0,00	0,00	0,00	1.474.040,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.200.230,00	2.150.000,00	0,00	0,00	3.350.230,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	6.406.442,00	3.435.000,00	0,00	0,00	9.841.442,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.752.390,00	0,00	0,00	0,00	1.752.390,00
5	Badan Pendapatan Daerah	5.078.958,00	0,00	0,00	0,00	5.078.958,00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	950.200,00	0,00	0,00	950.200,00
7	Badan Penghubung Daerah	0,00	5.340.600,00	0,00	0,00	5.340.600,00
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.290.540,00	1.580.511,00	0,00	0,00	2.871.051,00
9	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	1.227.000,00	0,00	0,00	1.227.000,00
10	Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	2.246.000,00	0,00	0,00	2.246.000,00
11	Biro Umum	4.962.978,00	7.265.078,00	0,00	0,00	12.228.056,00
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	3.098.600,00	0,00	0,00	3.098.600,00

No	Perangkat Daerah	Piutang Pendapatan dari Pengembalian				Jumlah
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Hibah	Belanja Modal	
13	Dinas Kebudayaan	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	159.344,00	2.486.046,00	0,00	0,00	2.645.390,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.318.218,00	137.000,00	0,00	0,00	1.455.218,00
16	Dinas Kesehatan	0,00	15.881.500,00	0,00	100.156.096,37	116.037.596,37
17	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	3.505.370,00	8.528.861,00	0,00	0,00	12.034.231,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	1.011.882,00	0,00	0,00	1.011.882,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.413.012,00	3.435.800,00	0,00	0,00	4.848.812,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.247.182,00	809.800,00	0,00	0,00	7.056.982,00
21	Dinas Pariwisata	156.690,00	0,00	0,00	0,00	156.690,00
22	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.422.000,00	127.219.077,54	7.343.423,44	239.057.757,15	376.042.258,13
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	343.708,00	4.956.750,00	0,00	0,00	5.300.458,00
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2.181.452,00	1.531.411,00	0,00	11.000.116,02	14.712.979,02
25	Dinas Pendidikan	15.831.472,00	177.719.232,00	0,00	179.848.548,59	373.399.252,59
26	Dinas Perhubungan	1.089.782,00	0,00	0,00	0,00	1.089.782,00
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	739.944,00	6.243.100,00	0,00	3.567.000,00	10.550.044,00
28	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	3.080.374,00	0,00	0,00	0,00	3.080.374,00
29	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	153.000.056,36	0,00	0,00	153.000.056,36
30	Dinas Sosial	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
31	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	9.057.462,00	454.500,00	0,00	0,00	9.511.962,00
32	Inspektorat	5.687.578,00	0,00	0,00	0,00	5.687.578,00
33	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	2.286.272,00	18.528.118,00	0,00	534.259.633,72	555.074.023,72
34	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	1.430.921,00	0,00	0,00	0,00	1.430.921,00
35	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	2.721.108,00	0,00	0,00	0,00	2.721.108,00
36	Sekretariat DPRD	2.191.578,00	193.180.720,00	0,00	0,00	195.372.298,00
	Total	**84.029.045,00**	**744.956.842,90**	**7.343.423,44**	**1.067.889.151,85**	**1.904.218.463,19**

5) Piutang Pendapatan BLUD

Piutang Pendapatan BLUD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	5.542.944,00	**0,00**

Piutang Pendapatan BLUD digunakan untuk mencatat piutang pendapatan BLUD, piutang pendapatan BLUD dari jasa layanan, piutang pendapatan BLUD dari hibah,

piutang pendapatan BLUD dari hibah tidak terikat, piutang pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain, piutang pendapatan BLUD dari APBD, dan piutang pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.168 Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO AWAL PIUTANG	KOREKSI SALDO AWAL		PELUNASAN	MUTASI PIUTANG TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR PIUTANG
			Tambah	Kurang		Penetapan	Pelunasan	
1	2	3	4	5	6	7	8	10=3+4-5-6+7-8
1	PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA	0,00	0,00	0,00	0,00	298.220.205,00	298.220.205,00	0,00
2	PT. SEBASTIAN CITRA INDONESIA STAND ROTI O (LISTRIK & AIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	43.444.041,00	43.444.041,00	0,00
3	DEWE MART (LISTRIK DAN AIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.838.252,00	8.838.252,00	0,00
4	ROTI RAJA (LISTRIK DAN AIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542.944,00	5.542.944,00	0,00
5	KDH UNTUNG SABUT (KOPI DARI HATI)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542.944,00	0,00	5.542.944,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**361.588.386,00**	**356.045.442,00**	**5.542.944,00**

7.5.3.1.1.9 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	96.250.000,00	**96.250.000,00**

Piutang lainnya adalah piutang yang timbul dari kegiatan yang pengakuannya tidak dapat diklasifikasikan pada piutang pajak maupun piutang retribusi. Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Piutang lainnya sebesar Rp96.250.000,00 yang merupakan piutang atas kelebihan pembayaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang timbul karena adanya reviu Inspektorat terhadap pengurangan utang.

Rincian Piutang Lainnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.169 Rekapitulasi Piutang Lainnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKANAN / URAIAN	KETERANGAN	JUMLAH
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	PT. TIGA NAGA MAS	Peningkatan Mesjid Baiturahman Kabupaten Karimun	96.250.000,00
	TOTAL			**96.250.000,00**

7.5.3.1.1.10 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	(19.701.173.291,11)	**(66.851.818.877,95)**

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp(19.701.173.291,11) terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp(14.837.858.955,68), Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp(2.549.604.975,13) dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp(2.313.709.360,30).

1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Penyisihan Piutang Pajak Daerah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	(14.837.858.955,68)	**(46.281.323.152,41)**

Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp(14.837.858.955,68) merupakan pencadangan atas potensi tidak tertagihnya piutang pajak daerah dimana Penilaian Umur Piutang Pajak dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 7.5.170 Persentase Penyisihan Piutang Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang

No.	Jenis Piutang	Kualitas/Umur Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
		(0,5%)	(10%)	(50%)	(100%)
1.	Piutang Pajak (*self assessment)*	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
2.	Piutang Pajak (*official assessment)*	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
3.	Piutang Bukan Pajak Khusus Untuk Objek Retribusi	< 1 bulan	≥ 1 s.d 3 bulan	> 3 s.d 12 bulan	> 12 bulan
4.	Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi	Belum dilakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo	1 bulan terhitung sejak surat tagihan pertama	1 bulan terhitung sejak surat tagihan kedua	1 bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga

Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung menurut persentase masing-masing kualitas piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Besaran penyisihan piutang pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.171 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Piutang	Umur Piutang				Penyisihan Piutang
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
	TOTAL PIUTANG	**15.748.913.159,68**	**760.550.800,00**	**0,00**	**308.612.316,00**	**14.679.750.043,68**	**14.837.858.955,68**
I	**SKPDKB**	**4.959.226.094,00**	0,00	0,00	0,00	**4.959.226.094,00**	**4.959.226.094,00**
	PKB	1.007.790.974,00	0,00	0,00	0,00	1.007.790.974,00	1.007.790.974,00
	BBNKB	3.951.435.120,00	0,00	0,00	0,00	3.951.435.120,00	3.951.435.120,00
II	**Pokok PKB dan BBN-KB**	**9.796.294.267,00**	**760.550.800,00**	**0,00**	**308.612.316,00**	**8.727.131.151,00**	**8.885.240.063,00**
1	BATAM	8.511.871.567,00	728.967.400,00	0,00	281.534.766,00	7.501.369.401,00	7.645.781.621,00
2	TANJUNGPINANG	583.133.675,00	0,00	0,00	20.481.900,00	562.651.775,00	572.892.725,00
3	BINTAN	157.267.600,00	0,00	0,00	1.119.400,00	156.148.200,00	156.707.900,00
4	KARIMUN	335.592.575,00	0,00	0,00	2.841.000,00	332.751.575,00	334.172.075,00

No	Uraian	Saldo Piutang	Umur Piutang				Penyisihan Piutang
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
5	LINGGA	23.347.800,00	0,00	0,00	0,00	23.347.800,00	23.347.800,00
6	NATUNA	185.081.050,00	31.583.400,00	0,00	2.635.250,00	150.862.400,00	152.337.942,00
7	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**PBBKB**	**227.908.858,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.908.858,43**	**227.908.858,43**
	PBBKB	227.908.858,43	0,00	0,00	0,00	227.908.858,43	227.908.858,43
IV	**PAJAK ALAT BERAT**	**303.715.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303.715.000,00**	**303.715.000,00**
	PAJAK ALAT BERAT	303.715.000,00	0,00	0,00	0,00	303.715.000,00	303.715.000,00
IV	**AIR PERMUKAAN**	**461.768.940,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**461.768.940,25**	**461.768.940,25**
1	BATAM	12.000.000,25	0,00	0,00	0,00	12.000.000,25	12.000.000,25
2	TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BINTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KIJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	KARIMUN	449.768.940,00	0,00	0,00	0,00	449.768.940,00	449.768.940,00
6	TANJUNG BATU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LINGGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	NATUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	(2.549.604.975,13)	**(2.464.841.332,73)**

Penyisihan Piutang Retribusi digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi sehingga nilai piutang retribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Penyisihan Piutang Retribusi periode 31 Desember 2025 sebesar Rp(2.549.604.975,13) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.172 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Retribusi

NO	URAIAN	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG DIRAGUKAN TERTAGIH
1	Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	139.720.397,00	27.980.945,49
2	Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	4.080.272.472,00	2.441.116.565,37
3	Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	106.415.392,00	18.328.076,96
4	Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	123.955.500,00	61.977.750,00

NO	URAIAN	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG DIRAGUKAN TERTAGIH
5	Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan	40.327.461,00	201.637,31
SALDO AKHIR PENYISIHAN PIUTANG		**4.490.691.222,00**	**2.549.604.975,13**

Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud tahun 2025 sebesar Rp(27.980.945,49) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.173 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO PIUTANG	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	JASA RAHARJA	1.659.730,00	1.659.730,00	0,00	0,00	0,00	8.298,65
2	JAMKESDA PROVINSI	66.622.200,00	66.622.200,00	0,00	0,00	0,00	333.111,00
3	PT INHEALTH	587.800,00	587.800,00	0,00	0,00	0,00	2.939,00
4	TCM/GLOBAL FUND	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
5	PP ALILA VILLA	843.900,00	0,00	0,00	0,00	843.900,00	843.900,00
6	PP CONDOTEL	6.285.100,00	0,00	0,00	0,00	6.285.100,00	6.285.100,00
7	HUTAMA KARYA	13.102.500,00	0,00	0,00	0,00	13.102.500,00	13.102.500,00
8	BINTAN LAGOON	7.153.500,00	0,00	0,00	0,00	7.153.500,00	7.153.500,00
9	PERTAMINA	33.244.446,00	33.244.446,00	0,00	0,00	0,00	166.222,24
10	TASPEN	360.721,00	0,00	360.721,00	0,00	0,00	36.072,10
11	AMODA	4.340.500,00	4.340.500,00	0,00	0,00	0,00	21.702,50
		139.720.397,00	**111.974.676,00**	**360.721,00**	**0,00**	**27.385.000,00**	**27.980.945,49**

Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib tahun 2025 sebesar Rp(2.441.116.565,37) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.174 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO PIUTANG	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	JKN / BPJS KESEHATAN	55.810.000,00	55.810.000,00	0,00	0,00	0,00	279.050,00
2	JKN PARSIAL RSUD KOTA TPI	30.212.000,00	30.212.000,00	0,00	0,00	0,00	151.060,00
3	JAMKESDA PROV. KEPRI	307.503.000,00	307.503.000,00	0,00	0,00	0,00	1.537.515,00
4	PT. BRC	2.853.950,00	2.853.950,00	0,00	0,00	0,00	14.269,75
5	BPJS KETENAGAKERJAAN	381.246.875,00	381.246.875,00	0,00	0,00	0,00	1.906.234,37
6	PT. INHEALTH INDONESIA	14.147.699,00	14.147.699,00	0,00	0,00	0,00	70.738,50
7	TASPEN	45.853.150,00	45.853.150,00	0,00	0,00	0,00	229.265,75
8	KEMENKES (TKI DEPORTASI)	16.646.988,00	0,00	0,00	0,00	16.646.988,00	16.646.988,00
9	KIMIA FARMA	13.980.000,00	13.980.000,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00
10	AIRNAV	9.170.600,00	9.170.600,00	0,00	0,00	0,00	45.853,00
11	PT. JASA RAHARJA	110.176.800,00	110.176.800,00	0,00	0,00	0,00	550.884,00
12	PT. MEITECH	421.906.000,00	421.906.000,00	0,00	0,00	0,00	2.109.530,00

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO PIUTANG	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
13	PT. NAYAKA ERA HUSADA	1.885.700,00	1.885.700,00	0,00	0,00	0,00	9.428,50
14	PT. PELINDO I	1.186.350,00	1.186.350,00	0,00	0,00	0,00	5.931,75
15	PASIEN UMUM	2.667.693.360,00	6.433.450,00	142.303.965,00	231.457.184,00	2.287.498.761,00	2.417.489.916,75
		4.080.272.472,00	**1.402.365.574,00**	**142.303.965,00**	**231.457.184,00**	**2.304.145.749,00**	**2.441.116.565,37**

Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib tahun 2025 sebesar Rp(18.328.076,96) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.175 Rekapitulasi Penyisihan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO PIUTANG	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	SEWA LOKET KIMIA FARMA	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2	SEWA KANTIN RODIAH	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	1.875.000,00
3	SEWA KANTIN BU RINA	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	1.025.000,00
4	SEWA LAHAN LATASHA_EOADDICTED - YOUNG LIVING LESTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	KANTOR KAS BANK RIAU KEPRI SYARIAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ATM BANK RIAU KEPRI SYARIAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SEWA LAHAN DEWE MART LT.1 RSUD RAT	17.152.000,00	17.152.000,00	0,00	0,00	0,00	85.760,00
8	SEWA LAHAN STAND KANTIN HENI LANTAI 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SEWA LAHAN KDH UNTUNG SABUT (KOPI DARI HATI) - 2025	68.463.392,00	68.463.392,00	0,00	0,00	0,00	342.316,96
		106.415.392,00	**85.615.392,00**	**0,00**	**5.800.000,00**	**15.000.000,00**	**18.328.076,96**

Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp(61.977.750,00) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.176 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

No	NAMA WAJIB RETRIBUSI	SALDO PIUTANG RETRIBUSI	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	CV. AIR BUNGA	4.602.500,00	0,00	0,00	4.602.500,00	0,00	2.301.250,00
2	CV. ANAK TAMIANG	7.376.500,00	0,00	0,00	7.376.500,00	0,00	3.688.250,00
3	CV. BAHANA ROBAT	10.680.000,00	0,00	0,00	10.680.000,00	0,00	5.340.000,00
4	CV. CITRA BUMI LOSARI	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	225.000,00
5	CV. INDOCO	4.602.500,00	0,00	0,00	4.602.500,00	0,00	2.301.250,00
6	CV. KARYA CIPTA UTAMA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	300.000,00
7	CV. MATA AIR	3.802.500,00	0,00	0,00	3.802.500,00	0,00	1.901.250,00
8	CV. MENARA ADI JAYA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	225.000,00

No	NAMA WAJIB RETRIBUSI	SALDO PIUTANG RETRIBUSI	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
9	CV. NICHA BINTAN	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00
10	CV. PORMULA JAYA	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	1.200.000,00
11	CV. SAMUDERA JAYA PERKASA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00
12	CV. SINAR NUSANTARA IMPLEMENTASI	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	600.000,00
13	CV. TANJUNG PUTRI MANDIRI	3.302.500,00	0,00	0,00	3.302.500,00	0,00	1.651.250,00
14	CV. TRI BUANA CITRA PERKASA	6.772.500,00	0,00	0,00	6.772.500,00	0,00	3.386.250,00
15	PT. BENTAN SONDONG	30.950.000,00	0,00	0,00	30.950.000,00	0,00	15.475.000,00
16	PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA-PT.MINARTA DUTAHUTAMA,KSO	1.698.000,00	0,00	0,00	1.698.000,00	0,00	849.000,00
17	PT. MAJU BERSAMA JAYA	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00	366.000,00
18	PT. MIRA	10.907.500,00	0,00	0,00	10.907.500,00	0,00	5.453.750,00
19	PT. NATHANS MULIA MANDIRI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	750.000,00
20	PT. PANDJI BANGUN PERSADA	19.963.500,00	0,00	0,00	19.963.500,00	0,00	9.981.750,00
21	PT. PULAU SAMOSIR SAKTI PERKASA	4.515.500,00	0,00	0,00	4.515.500,00	0,00	2.257.750,00
22	PT. SUMBER ARTHA REKSA MULIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	75.000,00
23	PT. TIARA INDOPENTA,KSO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00
24	PT. YUDHA PERKASA UTAMA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	150.000,00
		123.955.500,00	**0,00**	**0,00**	**123.955.500,00**	**0,00**	**61.977.750,00**

Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp(201.637,31) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.177 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan Dinas Perhubungan

NO	NAMA WR	JUMLAH PIUTANG	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	Agen Tiket (Muhammad Ali)	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
2	ANDRI	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
3	PT. Tirta Bintan Abadi	727.400,00	727.400,00	0,00	0,00	0,00	3.637,00
4	Kedai Makan Sejahtera (Rosmawati)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5	Nicky Chandra	5.701.811,00	5.701.811,00	0,00	0,00	0,00	28.509,06
6	PT. Tuah Bainaura Perkasa	11.086.600,00	11.086.600,00	0,00	0,00	0,00	55.433,00
7	Tomy	1.139.650,00	1.139.650,00	0,00	0,00	0,00	5.698,25
8	PT. Lautan Karimun Manggala	75.625,00	75.625,00	0,00	0,00	0,00	378,13
9	PT. Cahaya Belawa Inhil	236.200,00	236.200,00	0,00	0,00	0,00	1.181,00
10	PT. Anugrah Jala Chandra	2.187.625,00	2.187.625,00	0,00	0,00	0,00	10.938,12
11	Apnal Jony	54.750,00	54.750,00	0,00	0,00	0,00	273,75
12	PT. Berkah Bandar Nusa	4.242.000,00	4.242.000,00	0,00	0,00	0,00	21.210,00
13	PT. ASDP Indonesia Cabang Batam	13.891.800,00	13.891.800,00	0,00	0,00	0,00	69.459,00
		40.327.461,00	**40.327.461,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.637,31**

3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp(2.313.709.360,30) terdiri dari Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp(2.313.343.400,00), Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian

Laboratorium sebesar Rp(333.600,00) dan Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp(4.645,58) serta Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain sebesar Rp(27.714,72).

a. Penyisihan Piutang Denda Pajak

Penyisihan Piutang Denda Pajak	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	2.313.343.400,00	**(18.105.318.343,12)**

Penyisihan Piutang Denda Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp(2.313.343.400,00) merupakan pencadangan atas potensi tidak tertagihnya piutang denda pajak. Besaran Penyisihan Piutang Denda Pajak pada tahun 2025 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.178 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Denda Pajak Tahun 2025

No	Uraian	Saldo Piutang	Umur Piutang				Penyisihan Piutang
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
	TOTAL PIUTANG	**2.352.074.250,00**	0,00	0,00	**77.461.700,00**	**2.274.612.550,00**	**2.313.343.400,00**
I	**Denda Pokok PKB dan BBN-KB**	**2.352.074.250,00**	0,00	0,00	**77.461.700,00**	**2.274.612.550,00**	**2.313.343.400,00**
1	BATAM	2.143.235.785,00	0,00	0,00	74.895.800,00	2.068.339.985,00	2.105.787.885,00
2	TANJUNGPINANG	97.379.290,00	0,00	0,00	2.506.000,00	94.873.290,00	96.126.290,00
3	BINTAN	14.873.100,00	0,00	0,00	10.100,00	14.863.000,00	14.868.050,00
4	KARIMUN	70.819.850,00	0,00	0,00	19.300,00	70.800.550,00	70.810.200,00
5	LINGGA	5.265.525,00	0,00	0,00	0,00	5.265.525,00	5.265.525,00
6	NATUNA	20.500.700,00	0,00	0,00	30.500,00	20.470.200,00	20.485.450,00
7	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**DENDA PBBKB**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Denda PBBKB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**DENDA PAJAK ALAT BERAT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Denda Pajak Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	**DENDA AIR PERMUKAAN**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BATAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TANJUNGPINANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BINTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	KIJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	KARIMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TANJUNG BATU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LINGGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	NATUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ANAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b. Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi

Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	(338.245,58)	**(336.049,69)**

Pada akhir periode 31 Desember 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp(338.245,58) terdiri dari Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp(333.600,00) dan Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp(4.645,58) yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.179 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Pemakaian Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

JENIS PIUTANG DENDA	SALDO PIUTANG DENDA RETRIBUSI	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG DENDA RETRIBUSI
		0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
Piutang Denda Retribusi Pemakaian Laboratorium	667.200,00	0,00	0,00	667.200,00	0,00	333.600,00
	667.200,00	**0,00**	**0,00**	**667.200,00**	**0,00**	**333.600,00**

Tabel 7.5.180 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan

JENIS PIUTANG DENDA	SALDO PIUTANG DENDA RETRIBUSI	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI
		0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	929.116,00	929.116,00	0,00	0,00	0,00	4.645,58
	929.116,00	**929.116,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.645,58**

c. Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD

Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	(27.714,72)	**0,00**

Penyisihan Piutang BLUD digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan BLUD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan BLUD sehingga nilai piutang pendapatan BLUD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp(27.714,72) yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.181 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO PIUTANG	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA PIHAK KE-3	SALDO PIUTANG	UMUR PIUTANG				PENYISIHAN PIUTANG
			0 - 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
2	PT. SEBASTIAN CITRA INDONESIA STAND ROTI O (LISTRIK & AIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DEWE MART (LISTRIK DAN AIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ROTI RAJA (LISTRIK DAN AIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	KDH UNTUNG SABUT (KOPI DARI HATI)	5.542.944,00	5.542.944,00	0,00	0,00	0,00	27.714,72
		5.542.944,00	**5.542.944,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.714,72**

7.5.3.1.1.11 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	1.984.982.256,93	**1.809.609.683,07**

Beban Dibayar Dimuka digunakan untuk mencatat manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain yang telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi pada saat pemerintah daerah mempunyai hak klaim tersebut. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pembayaran sewa yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dicatat dengan pendekatan beban dan Beban Sewa Dibayar Dimuka untuk mencatat sisanya.

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat transaksi Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp1.984.982.256,93 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.182 Rekapitulasi Beban Dibayar Dimuka OPD per 31 Desember 2025

No	Nama OPD	Saldo Beban Dibayar Dimuka
1	Dinas Pendidikan	79.707.638,89
2	Dinas Kesehatan	13.027.777,78
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.166.666,67
4	Dinas Sosial	59.037.500,00
5	Dinas Perhubungan	8.958.333,33
6	Dinas Pariwisata	22.666.666,67
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	586.198.030,00
8	Biro Umum	415.557.292,65
9	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.472.222,22
10	Badan Keuangan dan Aset Daerah	112.916.666,67
11	Badan Pendapatan Daerah	659.611.462,05
12	Sekretariat DPRD	4.662.000,00
Total		**1.984.982.256,93**

Adapun rincian Beban Dibayar Dimuka dijelaskan pada **Lampiran 3.**

7.5.3.1.1.12 Persediaan

Persediaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	116.695.901.122,37	**294.022.966.235,40**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pencatatan persediaan dengan metode Periodik dan perpetual. Dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, perputarannya cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis. Nilai persediaan akan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Dengan metode periodik ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode, dicatat secara perpetual meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi, perputarannya lambat, jenis persediaan yang sifatnya *continues*, dan membutuhkan kontrol yang besar antara lain berupa obat-obatan, suku cadang alat berat, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang sejenisnya. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*.

Saldo persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp116.695.901.122,37 merupakan sisa persediaan di OPD yang belum digunakan berupa Barang Habis Pakai sebesar Rp37.798.475.067,58 serta persediaan barang-barang yang akan diserahkan tetapi belum diserahkan sebesar Rp78.897.426.054,79 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.183 Rekapitulasi Persediaan Barang Habis Pakai Dan Hibah Per 31 Desember 2025

NO	NAMA SKPD	JUMLAH PERSEDIAAN HABIS PAKAI	JUMLAH PERSEDIAAN HIBAH	JUMLAH PERSEDIAAN 2025
1	***2***	***3***	***4***	***5 = (3+4)***
1	Sekretariat DPRD	62.377.000,00	0,00	62.377.000,00
2	Inspektorat	13.335.984,00	0,00	13.335.984,00
3	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00
4	Badan Pendapatan Daerah	2.618.554.090,00	0,00	2.618.554.090,00
5	Badan Kepegawaian dan Korpri	0,00	0,00	0,00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	1.265.439.195,00	1.265.439.195,00

NO	NAMA SKPD	JUMLAH PERSEDIAAN HABIS PAKAI	JUMLAH PERSEDIAAN HIBAH	JUMLAH PERSEDIAAN 2025
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.581.893,00	0,00	2.581.893,00
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	15.797.441,00	0,00	15.797.441,00
10	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	58.885,50	0,00	58.885,50
11	Badan Penghubung Daerah	4.423.400,00	0,00	4.423.400,00
12	Dinas Pendidikan	981.462,00	0,00	981.462,00
13	Dinas Kesehatan	13.388.303.602,66	71.776.286,97	13.460.079.889,63
14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	4.057.200,00	46.815.661.691,12	46.819.718.891,12
15	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	15.554.320,00	27.304.795.958,30	27.320.350.278,30
16	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.073.370,00	0,00	1.073.370,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79.200,00	0,00	79.200,00
20	Dinas Perhubungan	26.668.039,50	2.934.353.289,40	2.961.021.328,90
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.431.010,00	0,00	3.431.010,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	23.518.220,00	0,00	23.518.220,00
26	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.072.500,00	0,00	1.072.500,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	403.341.988,00	0,00	403.341.988,00
29	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00
30	Dinas Kebudayaan	1.053.400,00	0,00	1.053.400,00
31	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	506.319.783,95	505.399.634,00	1.011.719.417,95
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00
33	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	1.433.200,00	0,00	1.433.200,00
34	Biro Hukum	422.000,00	0,00	422.000,00
35	Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00
36	Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00
37	Biro Perekonomian dan Pembangunan	4.098.822,00	0,00	4.098.822,00
38	Biro Pengadaan Barang/Jasa	981.505,00	0,00	981.505,00
39	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	172.382,00	0,00	172.382,00
40	Biro Umum	0,00	0,00	0,00
41	Biro Administrasi Pimpinan	610.700,00	0,00	610.700,00
41	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	827.977.669,55	0,00	827.977.669,55
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib (BLUD)	16.511.505.997,96	0,00	16.511.505.997,96
42	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	798.571.028,00	0,00	798.571.028,00
	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (BLUD)	2.512.478.191,46	0,00	2.512.478.191,46

NO	NAMA SKPD	JUMLAH PERSEDIAAN HABIS PAKAI	JUMLAH PERSEDIAAN HIBAH	JUMLAH PERSEDIAAN 2025
43	Dinas Pendidikan (BOS)	10.916.822,00	0,00	10.916.822,00
44	Dinas Pendidikan (BLUD)	35.686.960,00	0,00	35.686.960,00
T O T A L		**37.798.475.067,58**	**78.897.426.054,79**	**116.695.901.122,37**

Persediaan sebesar Rp116.695.901.122,37 tidak termasuk pengadaan atas Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp43.840.654.761,00 dan Belanja Pakaian sebesar Rp4.717.849.431,00. Mutasi persediaan per OPD dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.184 Mutasi Persediaan per OPD

NO	OPD	SALDO AWAL	LAPORAN REALIASI ANGGARAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KELUAR	TOTAL PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
		PER-1 JANUARI 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	PER 31 DESEMBER 2025
1	***2***	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=(3+4+5)-6*	*8*	*9=7-8*
1	Sekretariat DPRD	0,00	7.025.412.557,00	0,00	1.165.200.715,00	5.860.211.842,00	5.797.834.842,00	62.377.000,00
2	Inspektorat	4.393.380,00	1.847.881.731,00	0,00	69.538.125,00	1.782.736.986,00	1.769.401.002,00	13.335.984,00
3	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	1.252.381.448,00	0,00	139.800.000,00	1.112.581.448,00	1.112.581.448,00	0,00
4	Badan Pendapatan Daerah	2.728.028.160,00	8.579.255.831,00	298.568.920,00	2.986.303.066,00	8.619.549.845,00	6.000.995.755,00	2.618.554.090,00
5	Badan Kepegawaian dan Korpri	0,00	438.149.979,00	0,00	47.880.000,00	390.269.979,00	390.269.979,00	0,00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	810.074.422,00	0,00	199.800.000,00	610.274.422,00	610.274.422,00	0,00
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	41.082.158,67	4.347.415.733,00	0,00	0,00	4.388.497.891,67	4.372.700.450,67	15.797.441,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.535.800,00	984.712.911,00	0,00	56.855.000,00	929.393.711,00	926.811.818,00	2.581.893,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.224.610.070,00	386.037.545,00	118.747.600,00	0,00	1.729.395.215,00	463.956.020,00	1.265.439.195,00
10	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	388.800,00	137.569.741,00	0,00	0,00	137.958.541,00	137.899.655,50	58.885,50
11	Badan Penghubung Daerah	3.450.000,00	1.592.062.525,00	85.571.934,00	1.340.000,00	1.679.744.459,00	1.675.321.059,00	4.423.400,00
12	Dinas Pendidikan	61.280.500,00	11.928.227.922,00	719.800,00	2.733.181.100,00	9.257.047.122,00	9.256.065.660,00	981.462,00
13	Dinas Kesehatan	15.108.027.467,74	7.058.574.381,25	50.517.874.046,07	363.066.553,00	72.321.409.342,06	58.861.329.452,43	13.460.079.889,63
14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	111.324.614.891,39	5.145.592.999,00	7.475.223.787,40	2.137.152.558,44	121.808.279.119,35	74.988.560.228,23	46.819.718.891,12
15	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	135.822.868.462,95	151.713.620.835,82	26.761.513.299,68	87.503.297.192,54	226.794.705.405,91	199.474.355.127,61	27.320.350.278,30
16	Dinas Sosial	0,00	3.100.892.151,00	0,00	408.807.050,00	2.692.085.101,00	2.692.085.101,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	2.057.939.098,00	53.036.590,00	0,00	2.110.975.688,00	2.110.975.688,00	0,00
18	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	465.800,00	1.503.821.071,26	0,00	414.355.864,26	1.089.931.007,00	1.088.857.637,00	1.073.370,00

NO	OPD	SALDO AWAL	LAPORAN REALIASI ANGGARAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KELUAR	TOTAL PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
		PER-1 JANUARI 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	PER 31 DESEMBER 2025
1	***2***	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=(3+4+5)-6*	*8*	*9=7-8*
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	115.200,00	705.694.759,00	0,00	113.744.000,00	592.065.959,00	591.986.759,00	79.200,00
20	Dinas Perhubungan	8.824.735.978,09	1.193.306.253,00	1.039.657.429,02	223.157.216,00	10.834.542.444,11	7.873.521.115,21	2.961.021.328,90
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.573.500,00	1.261.029.559,00	0,00	186.545.000,00	1.077.058.059,00	1.073.627.049,00	3.431.010,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	2.904.551.517,00	373.634.159,00	1.067.324.700,00	2.210.860.976,00	2.210.860.976,00	0,00
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.586.000,00	1.012.184.992,00	166.262.565,00	284.894.104,00	896.139.453,00	895.102.453,00	1.037.000,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	1.136.528.893,00	0,00	0,00	1.136.528.893,00	1.136.528.893,00	0,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.940.000,00	265.031.301,00	0,00	0,00	266.971.301,00	243.453.081,00	23.518.220,00
26	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.351.000,00	1.437.041.394,00	10.323.000,00	61.809.000,00	1.386.906.394,00	1.385.833.894,00	1.072.500,00
27	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	0,00	947.737.730,00	27.018.954,00	145.248.000,00	829.508.684,00	829.508.684,00	0,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	95.752.000,00	2.026.817.443,12	199.339.417,00	36.465.000,00	2.285.443.860,12	1.882.101.872,12	403.341.988,00
29	Dinas Pariwisata	17.298.000,00	1.069.744.380,00	188.895.785,00	102.909.500,00	1.173.028.665,00	1.173.028.665,00	0,00
30	Dinas Kebudayaan	122.200,00	519.137.737,00	0,00	0,00	519.259.937,00	518.206.537,00	1.053.400,00
31	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	845.057.928,00	10.282.084.481,00	2.489.189.043,00	7.067.917.695,00	6.548.413.757,00	5.536.694.339,05	1.011.719.417,95
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	3.540.495.878,00	69.787.000,00	3.272.418.000,00	337.864.878,00	337.864.878,00	0,00
33	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	831.720,00	643.216.702,00	0,00	244.876.304,00	399.172.118,00	397.738.918,00	1.433.200,00
34	Biro Hukum	123.600,00	350.125.200,00	0,00	123.423.100,00	226.825.700,00	226.403.700,00	422.000,00
35	Biro Organisasi	0,00	146.185.006,00	0,00	0,00	146.185.006,00	146.185.006,00	0,00

NO	OPD	SALDO AWAL	LAPORAN REALIASI ANGGARAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KELUAR	TOTAL PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
		PER-1 JANUARI 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	1 Jan s/d 31 Des 2025	PER 31 DESEMBER 2025
1	***2***	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=(3+4+5)-6*	*8*	*9=7-8*
36	Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	193.211.063,00	0,00	0,00	193.211.063,00	193.211.063,00	0,00
37	Biro Perekonomian dan Pembangunan	4.713.600,00	329.847.076,00	0,00	96.000.000,00	238.560.676,00	234.461.854,00	4.098.822,00
38	Biro Pengadaan Barang/Jasa	0,00	376.525.930,00	0,00	84.000.000,00	292.525.930,00	291.544.425,00	981.505,00
39	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	181.100,00	370.108.913,00	0,00	0,00	370.290.013,00	370.117.631,00	172.382,00
40	Biro Umum	0,00	15.119.485.257,00	99.886.000,00	0,00	15.219.371.257,00	15.219.371.257,00	0,00
41	Biro Administrasi Pimpinan	393.680,00	1.242.631.707,00	0,00	154.845.000,00	1.088.180.387,00	1.087.569.687,00	610.700,00
42	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	26.067.664,00	645.856.258,00	3.389.087.409,00	0,00	4.061.011.331,00	3.233.033.661,45	827.977.669,55
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib (BLUD)	12.861.579.699,20	0,00	77.700.827.728,00	74.050.901.429,24	16.511.505.997,96	0,00	16.511.505.997,96
43	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	1.714.505.568,90	4.938.684.162,00	339.962.204,00	3.296.658.965,00	3.696.492.969,90	2.897.921.941,90	798.571.028,00
	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (BLUD)	3.147.756.523,46	0,00	11.817.993.972,00	12.453.272.304,00	2.512.478.191,46	0,00	2.512.478.191,46
44	Dinas Pendidikan (DANA BOS)	154.535.783,00	0,00	49.038.087.562,00	49.181.706.523,00	10.916.822,00	0,00	10.916.822,00
45	Dinas Pendidikan (BLUD)	0,00	0,00	2.890.365.363,23	2.854.678.403,23	35.686.960,00	0,00	35.686.960,00
TOTAL		**294.022.966.235,40**	**262.566.886.472,45**	**235.151.573.567,40**	**253.329.371.467,71**	**538.412.054.807,54**	**421.716.153.685,17**	**116.695.901.122,37**

Total Persediaan sebesar Rp116.695.901.122,37 tidak termasuk persediaan dengan kondisi rusak atau kadaluarsa yang dapat dilihat dari tabel berikut ini dengan rincian pada **Lampiran 4**.

Tabel 7.5.185 Rekapitulasi Persediaan Dengan Kondisi Rusak atau Kadaluarsa Per 31 Desember 2025

No	NAMA OPD	OBAT-OBATAN	BAHAN MEDIS HABIS PAKAI	BAHAN-BAHAN KIMIA	BAHAN CETAK (KARCIS)	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = (3+4+5+6)*
1	Dinas Kesehatan	2.369.184.563,00	0,00	0,00	0,00	2.369.184.563,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau	95.039.261,29	21.982.287,90	0,00	0,00	117.021.549,19
3	Rumah Sakit Khusus Jiwa Dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	25.090.794,64	0,00	0,00	0,00	25.090.794,64
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	77.966.500,00	0,00	77.966.500,00
5	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	18.776.155,00	18.776.155,00
	TOTAL	**2.489.314.618,93**	**21.982.287,90**	**77.966.500,00**	**18.776.155,00**	**2.608.039.561,83**

7.5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang terdiri atas Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen. Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat investasi non permanen lainnya dan investasi permanen dengan rincian sebagai berikut:

7.5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Tahun 205 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	0,00	**0,00**

Merupakan investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk dana bergulir kepada masyarakat yang disalurkan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dasar penilaian investasi jangka panjang non permanen lainnya (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan (*net realizable value*) yaitu dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Penyebab tidak tertagihnya dana bergulir antara lain seleksi calon penerima dana bergulir kurang dilakukan dengan baik.

Tidak terdapat Saldo akhir *Net Realizable Value* (NRV) per 31 Desember 2025 dengan rincian perhitungan selama tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 7.5.186 Rekapitulasi Dana Bergulir Per 31 Desember 2025

SKPD	Saldo Awal	Penyaluran			Pengembalian Dana Bergulir	Saldo Akhir	Penyisihan Diragukan Tertagih	Saldo Akhir NRV
		Pengguliran	APBD Tahun Berjalan	Total				
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7 = 2+5-6	8	9 = 7+8
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18.198.063.868,00	0,00	0,00	0,00	82.836.000,00	18.115.227.868,00	(18.115.227.868,00)	0,00
Dinas Kelauatan dan Perikanan	15.953.332.709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.953.332.709,52	(15.953.332.709,52)	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	382.288.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.288.894,00	(382.288.894,00)	0,00
JUMLAH	**34.533.685.471,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.836.000,00**	**34.450.849.471,52**	**(34.450.849.471,52)**	**0,00**

7.5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	135.977.916.508,00	**138.205.300.338,00**

Merupakan investasi berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada perusahaan-perusahaan daerah sebagai berikut:

Tabel 7.5.187 Rekapitulasi Investasi Jangka Panjang Permanen Per 31 Desember 2025

NO	URAIAN	SALDO TAHUN 2025
1	**Saldo Awal Investasi pada PT. Pembangunan Kepri**	**2.530.548.220,00**
	Penambahan	
	- Laba Tahun 2025 (Un-Audited)	323.079.823,00
	- Koreksi Saldo awal Ekuitas	10.963.757,00
	Saldo Akhir Investasi pada PT. Pembangunan Kepri	**2.864.591.800,00**
2	**Saldo Awal Investasi pada Perumda Air Minum Tirta Kepri**	**88.894.091.157,00**
	Pengurangan	
	- Koreksi Saldo awal Ekuitas	
	- Rugi tahun 2025 (Un-Audited)	(2.017.095.818,00)
	Penambahan	
	- Penyertaan Modal	
	- Koreksi Laba ditahan	(3.754.047.603,00)
	Saldo Akhir Investasi pada Perumda Air Minum Tirta Kepri	**83.122.947.736,00**
3	**PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)**	**12.000.000.000,00**

NO	URAIAN	SALDO TAHUN 2025
4	**Saldo Awal Investasi pada PT. Pelabuhan Kepri**	**35.161.043.520,00**
	Pengurangan	
	- Koreksi Saldo Awal Ekuitas	14.964.367,00
	- Koreksi (Rugi) Tahun Lalu	
	- Rugi tahun berjalan	(1.864.966.167,00)
	- Penyetoran Pend.	
	Saldo Akhir Investasi pada PT. Pelabuhan Kepri	**33.311.041.720,00**
5	**Saldo Awal Investasi pada PT. Energi Kepri (Perseroda)**	**5.000.000.000,00**
	Penambahan	
	- Rugi Tahun Berjalan	(320.664.748,00)
	- Koreksi Saldo awal Ekuitas	**0,00**
	Saldo Akhir Investasi pada PT. Energi Kepri (Perseroda)	**4.679.335.252,00**
	SALDO AKHIR PENYERTAAN MODAL	**135.977.916.508,00**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yaitu PT. Energi Kepri (Perseroda) untuk mengelola kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Selanjutnya pada tanggal 24 November 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan penyertaan modal untuk modal dasar yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sebesar Rp5.000.000.000,00 kepada PT. Energi Kepri (Perseroda) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Energi Kepri.

Metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah metode ekuitas pada PDAM Tirta Kepri dengan persentase kepemilikan sebesar 100%, PT. Pembangunan Kepri dengan persentase kepemilikan sebesar 100% dan PT. Pelabuhan Kepri dengan persentase kepemilikan sebesar 99,95% serta PT. Energi Kepri (Perseroda) dengan persentase kepemilikan sebesar 100,00%.

Metode biaya digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dengan persentase kepemilikan sebesar 0,99%.

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp135.977.916.508,00 merupakan nilai penyertaan modal kepada PT. Pembangunan Kepri sebesar Rp2.864.591.800,00 (metode ekuitas) sesuai dengan nilai kekayaan bersih/ekuitas per 31 Desember 2025 yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Tahun 2025, PDAM Tirta Kepri sebesar Rp83.122.947.736,00 (metode ekuitas) sesuai dengan nilai kekayaan bersih/ekuitas per 31 Desember 2025 yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Tahun

2025, PT. Pelabuhan Kepri sebesar Rp33.311.041.720,00 (metode ekuitas) sesuai dengan nilai kekayaan bersih/ekuitas per 31 Desember 2025 yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Tahun 2025, PT. Energi Kepri (Perseroda) sebesar Rp4.679.335.252,00 (metode ekuitas) sesuai dengan nilai kekayaan bersih/ekuitas per 31 Desember 2025 yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Tahun 2025, dan PT. Bank Riau Kepri Syariah sebesar Rp12.000.000.000,00 (metode biaya) sesuai dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Kondisi keuangan PDAM Tirta Kepri masih mengalami kerugian, akan tetapi nilai kerugian menurun dibandingkan tahun 2024 berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2025. Menurunnya nilai kerugian di tahun 2025 dikarenakan adanya kenaikan pendapatan operasional sebesar Rp2.473.647.084,00 dibandingkan pendapatan operasional di tahun sebelumnya.

PT. Pelabuhan Kepri di tahun 2025 masih mengalami kerugian, hal tersebut disebabkan menurunnya pendapatan operasional sebesar Rp581.588.848,00 dan meningkatnya beban sebesar Rp143.161.820,00 dibandingkan tahun 2024 yang berdasarkan Laporan Keuangan PT. Pelabuhan Kepri per 31 Desember 2025.

Adapun langkah-langkah kedepannya yang akan dilakukan untuk memperbaiki keuangan BUMD Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

1. Melakukan perbaikan kelembagaan BUMD.
2. Melakukan pembinaan dan meningkatkan pengawasan BUMD secara rutin dan berkala dalam rangka upaya peningkatkan kinerja BUMD.
3. Melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Melakukan diversifikasi usaha guna menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat yang masih berkaitan dengan usaha inti BUMD.
5. Optimalisasi Sumber Daya dan Potensi Daerah.

7.5.3.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, berupa :

a. Tanah
b. Peralatan dan Mesin
c. Gedung dan Bangunan
d. Jalan,Irigasi dan Jaringan
e. Aset Tetap Lainnya dan
f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat

dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Perolehan setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap, yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas, yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, maka tidak dikapitalisasi melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan (*expense*). Pengeluaran yang dikapitalisasi berupa penggantian utama merupakan pembaharuan bagian dari aset tetap atau nilai pemeliharaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.188 Kapitalisasi atas biaya pemeliharaan

No.	Aset Tetap	Nilai Pemeliharaan
1	Peralatan dan Mesin	50% dari nilai perolehan
2	Gedung dan Bangunan	10% dari nilai perolehan
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10% dari nilai perolehan

Pada saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 46 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Aset tetap sebesar Rp5.898.355.749.529,72 per 31 Desember 2025 merupakan nilai perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Nilai aset tetap per 31 Desember 2025 termasuk Aset Tetap yang bersumber dari pengelolaan dana BOSP, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Bantuan Pemerintah, dan Hibah serta *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan rincian perjenis sebagai berikut:

Tabel 7.5.189 Rekapitulasi Aset Tetap Per 31 Desember 2025

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
Tanah	1.187.619.664.254,11	1.279.193.541.736,32
Peralatan dan Mesin	2.213.822.502.843,21	2.115.169.411.496,30
Gedung dan Bangunan	2.997.282.508.161,98	2.878.738.414.770,81
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.112.540.134.981,23	4.011.564.533.138,15
Aset Tetap Lainnya	301.651.608.245,70	279.218.737.302,70

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	29.005.424.963,95	25.295.808.664,94
Akumulasi Penyusutan	(4.943.566.093.920,46)	(4.549.816.476.728,71)
SALDO AKHIR ASET TETAP	**5.898.355.749.529,72**	**6.039.363.970.380,51**

7.5.3.1.3.1 Tanah

Tanah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	1.187.619.664.254,11	**1.279.193.541.736,32**

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan berdasarkan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap yang dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya yang berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar atau dengan kata lain setiap penambahan Rp1,00 (satu rupiah) terhadap aset tetap sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan kapitalisasi. Komponen biaya perolehan aset tetap tanah meliputi harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan lain-lain. Biaya Pengeluaran untuk pengadaan tanah yang dapat dikapitalisasi meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo awal aset tetap Tanah per 1 Januari 2025 sebesar Rp1.279.193.541.736,32. Mutasi aset tetap Tanah selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.190 Mutasi Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2025

ASET TETAP TANAH				
I	**Saldo Awal ASET TETAP TANAH, 1 Januari 2025**			**1.279.193.541.736,32**
II	**Penambahan :**			
	1	Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025	992.100.000,00	
	2	Mutasi Tambah Aset Tetap Tanah Antar OPD	540.274.100,00	
	3	Penerimaan Hibah Aset Tetap Tanah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya	25.621.282.700,00	
		Total Penambahan		**27.153.656.800,00**
III	**Pengurangan :**			
	1	Mutasi Keluar Aset Tetap Tanah Antar OPD	540.274.100,00	
	2	Penghapusan Hibah Aset Tetap Tanah	15.541.752.478,00	

ASET TETAP TANAH				
	3	Reklasifikasi Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Properti Investasi	102.645.507.704,21	
		Total Pengurangan		**118.727.534.282,21**
IV	**Saldo Akhir ASET TETAP TANAH, 31 Desember 2025**			**1.187.619.664.254,11**

Berdasarkan tabel mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penambahan Aset Tetap Tanah pada Tahun 2025 sebesar Rp27.153.656.800,00 berasal dari:
   1. Belanja Modal Tanah tahun 2025 sebesar Rp992.100.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.
   2. Mutasi BMD Aset Tetap Tanah dari Dinas Kesehatan berdasarkan BAST Nomor 1857/BA-HB/PERLK/XI/2025 Tanggal 20 November 2025 pada Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp540.274.100,00
   3. Penerimaan Hibah Aset Tetap Tanah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya sebesar Rp25.621.282.700,00 antara lain:
      a. Hibah Aset Tetap Tanah dari Masyarakat (SMAN 1 Selat Gelam, SMAN 1 Palmatak, SMAN 2 Palmatak, SMAN 1 Pulau Posek, SMAN 27 Batam, SMKN 10 Batam, SMKN 11 Batam & USB SMAN sebesar Rp25.461.782.700,00.
      b. Hibah Aset Tetap Tanah dari Pemerintah Kota Tanjungpinang berdasarkan NPHD Nomor M/B/466/92/1.3.01/2025 dan BAST Nomor B/000.2.3.2/1145.2/BKAD-SET/2025 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp159.500.000,00

B. Pengurangan Aset Tetap Tanah pada Tahun 2025 sebesar Rp118.727.534.282,21 berasal dari:
   1. Mutasi BMD Aset Tetap Tanah ke Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud berdasarkan BAST Nomor 1857/BA-HB/PERLK/XI/2025 Tanggal 20 November 2025 pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp540.274.100,00
   2. Penghapusan Aset Tetap Tanah disebabkan Hibah sebesar Rp15.541.752.478,00 antara lain:
      a. Penghapusan Aset Tetap Tanah berdasarkan SK Penghapusan Nomor 945 Tahun 2025, Tanggal 26 Agustus 2025 Tanah Lapangan Apel/Upacara dan NPHD Nomor B/000.4.3.2/518.2/DISHUB-SET/2025 ke Pemerintah Kabupaten Lingga pada Dinas Pehubungan sebesar Rp734.720.149,00
      b. Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.831.908.990,00 antara lain:
         1) Penghapusan Aset Tetap Tanah karena Hibah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan BAST Nomor B/000.2.4/310.2/BKAD-SET/2025 dan B/166/032/III/2025 pada sebesar Rp3.442.150.000

2) Penghapusan Aset Tetap Tanah karena Hibah ke Yayasan Hidayatullah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 691 Tahun 2025 Tanggal 10 Juni 2025 sebesar Rp6.326.000,00
3) Penghapusan Aset Tetap Tanah karena Hibah ke Lembaga Penyiaran Publik TVRI Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 691 Tahun 2025 Tanggal 10 Juni 2025 sebesar Rp2.727.000,00
4) Penghapusan Aset Tetap Tanah karena Hibah ke Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 691 Tahun 2025 Tanggal 10 Juni 2025 sebesar Rp41.500.000,00
5) Penghapusan Aset Tetap Tanah karena Hibah ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 691 Tahun 2025 Tanggal 10 Juni 2025 sebesar Rp10.000.000,00
6) Penghapusan Aset Tetap Tanah karena Hibah ke Pemerintah Kabupaten Lingga berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 691 Tahun 2025 Tanggal 10 Juni 2025 sebesar Rp272.760.400,00
7) Penghapusan Aset Tetap Tanah karena Hibah ke Pemerintah Kota Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1318 Tahun 2025 Tanggal 18 Desember 2025 sebesar Rp2.050.000,00
8) Penghapusan Aset Tetap Tanah karena Hibah ke Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1318 Tahun 2025 Tanggal 18 Desember 2025 sebesar Rp6.800.000,00
9) Penghapusan Aset Tetap Tanah karena Hibah ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 691 Tahun 2025 Tanggal 10 Juni 2025 sebesar Rp47.595.590,00
10) Penghapusan Aset Tetap Tanah karena Hibah Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 691 Tahun 2025 Tanggal 10 Juni 2025 sebesar Rp14.538.397,00

c. Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp10.960.584.942,00 antara lain:
1) Penghapusan Aset Tetap Tanah karena Hibah ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan BAST Nomor B/032/131.3/BKAD-SET/2024 dan NPHD Nomor B/032/130.3/BKAD-SET/2024 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 691 Tahun 2025 Tanggal 10 Juni 2025 sebesar Rp4.881.984.942,00
2) Penghapusan Aset Tetap Tanah karena Hibah ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor 691 Tahun 2025 Tanggal 10 Juni 2025 sebesar Rp4.166.400.000,00

3) Penghapusan Aset Tetap Tanah karena Hibah ke Pangkalan TNI Angkatan Udara Raja Haji Fisabilillah (Tanah Untuk Jalan Landasan Pacu Pesawat Terbang) berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1318 Tahun 2025 Tanggal 18 Desember 2025 sebesar Rp1.912.200.000,00

3. Reklasifikasi Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Properti Investasi sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1183 Tahun 2025 sebesar Rp102.645.507.704,21 antara lain:
   a. Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp101.669.191.704,21
   b. Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp976.316.000,00

C. Saldo akhir Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.187.619.664.254,11.

Adapun rincian mutasi aset tetap tanah per OPD dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.5.191 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 2 + 3 + 4 - 5*
Dinas Pendidikan	212.245.860.504,70	0,00	25.461.782.700,00	0,00	237.707.643.204,70
Dinas Kesehatan	540.274.100,00	0,00	0,00	540.274.100,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	2.000.000.000,00	0,00	540.274.100,00	0,00	2.540.274.100,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	759.863.754.627,97	992.100.000,00	159.500.000,00	112.629.776.646,21	648.385.577.981,76
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.915.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.915.000.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1.753.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.753.500.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	2.774.880.000,00	0,00	0,00	0,00	2.774.880.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.309.166.300,00	0,00	0,00	0,00	1.309.166.300,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 2 + 3 + 4 - 5*
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	50.214.916.983,00	0,00	0,00	734.720.149,00	49.480.196.834,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	2.027.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.027.350.000,00
Dinas Pariwisata	2.579.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.579.000.000,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	198.407.288.648,65	0,00	0,00	4.822.763.387,00	193.584.525.261,65
Badan Pendapatan Daerah	8.962.550.572,00	0,00	0,00	0,00	8.962.550.572,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penghubung Daerah	29.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.600.000.000,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**1.279.193.541.736,32**	**992.100 .000,00**	**26.161.556.800,00**	**118.727.534.282,21**	**1.187.619.664.254,11**

Dari Saldo Akhir Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 Rp1.187.619.664.254,11 terdapat Aset Tetap Tanah sebanyak 828 persil dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.5.192 Rekapitulasi Rincian Aset Tetap Tanah

No.	Klasifikasi	Dokumen Kepemilikan	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp)
1	Bidang Tanah	Bersertipikat an. Provinsi Kepulauan Riau	562	782.695.081.905,82
		Bersertipikat an. Pihak Lain	43	23.709.574.200,00
		Belum bersertipikat	217	379.987.494.855,29
2	Bukan Bidang Tanah	Bersertipikat an. Provinsi Kepulauan Riau	6	1.227.513.293,00
		Jumlah Total	**828**	**1.187.619.664.254,11**

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 6 (enam) persil yang bukan merupakan bidang tanah sebesar Rp1.227.513.293,00. Selanjutnya akan dilakukan koreksi dan kapitalisasi atas aset tetap tanah tersebut ke dalam aset induk. Rincian Aset Tetap Tanah tersebut disajikan pada **Lampiran 5**.

D. Permasalahan Aset Tetap Tanah eks PT Antam

Pada tahun 2006 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima hibah berupa aset tanah Penarik I dengan luas ± 22,9464 Ha dari Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan BAST Nomor 13/BA/ADM-PEM/VI/2006 tanggal 6 Juni 2006.

Tabel 7.5.193 Bidang Tanah Penarik II

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Barang	Register	Luas (Ha)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Asal Usul	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.001.004.001	000373	48,7169 (Nilai perolehan awal 60,2822)	2006	Penarik II Senggarang Tanjungpinang	Hibah	1 Hibah dari Bintan Tahun 2006 berdasarkan BA Nomor 13/BA/ADM-PEM/VI/2006 2 Sudah dihibahkan kepada instansi Vertikal

Pada tahun 2010 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan hibah tanah di wilayah Penarik II kepada Kejaksaan Tinggi seluas ± 4 Ha berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 0313.a/KDhKepri.011/11.10 tanggal 18 November 2010 tentang Serah Terima Lahan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau untuk Pembangunan Kantor dan Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau di Senggarang Tanjungpinang. Kemudian pada Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga menghibahkan tanah di Penarik II kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 3 Ha berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor B/032/2303/BKAD-SET/2022, Nomor B-1023/L.10/Cum.1/09/2022 tanggal 26 September 2022 senilai Rp1.080.000.000,00 (satu miliar delapan puluh juta rupiah).

Pada Tahun 2011 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan hibah tanah di wilayah Penarik II kepada Kementerian Sosial seluas ± 3 Ha berdasarkan

Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 064.a/Kdh Kepri.030/2.11 tanggal 24 Februari 2011 tentang Serah Terima Hibah Tanah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Kementerian Sosial RI untuk Pembangunan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di Kota Tanjungpinang.

Pada tahun 2012 terdapat Akta Hibah Nomor 25/2012 tanggal 22 Maret 2012 antara Gubernur Kepulauan Riau selaku pemberi hibah dan Menteri Sosial Republik Indonesia selaku penerima hibah yang menyatakan tanah yang menjadi objek serah terima berdasarkan hasil ukur atau luas tanah yang dapat disertifikatkan adalah seluas 2,5 Ha (dua koma lima hektar), lalu terdapat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463 Tahun 2013 tentang Kehutanan di Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Riau belum bisa dilakukan sertifikasi sehingga pada tahun 2015 dibuat Berita Acara Pembatalan Hibah terhadap sisa tanah seluas 0,5 Ha (nol koma lima hektar) berdasarkan Berita Acara Nomor 591/325.4/SET tanggal 30 April 2015 tentang Pembatalan Hibah Sisa Tanah Lahan Pembangunan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Kementerian Sosial RI.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan hibah tanah di wilayah Penarik II kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seluas 12.476 m² (dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan nilai Rp449.136.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 120/1531/BPKAD/SET tanggal 2 September 2019.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan hibah tanah di wilayah Penarik II kepada Kementerian Agama Republik Indonesia seluas 8.177 m² (delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) dengan nilai Rp294.371.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor 120/1532/BPKAD/SET tanggal 2 September 2019.

Pada Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan hibah tanah di wilayah Penarik I kepada Komando Resor Militer 033 / WIRA PRATAMA seluas 43.000 m² (empat puluh tiga ribu meter persegi) dengan nilai Rp1.548.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 120/528.6/BPKAD-SET/2020 tanggal 1 April 2020.

Kemudian pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan hibah tanah di wilayah Penarik I kepada Komando Resor Militer 033 / WIRA PRATAMA seluas 8.000 m2 (delapan ribu meter persegi) dengan nilai Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor B/032/2304/BKAD-SET/2022 tanggal 26 September 2022.

Selanjutnya untuk tindaklanjut terhadap wilayah penarik I dengan sisa lahan 17,8464 Ha telah dihibahkan pada Tahun 2024 kepada Komando Resor Militer 033/WIRA PRATAMA berdasarkan BAST Nomor B/032/688.3/BKAD-SET/2024 dan Nomor 01/BAST/VIII/2024.

Terhadap wilayah Penarik II dengan lahan 48,7169 Ha akan diselesaikan bersama dengan *stakeholder* terkait yang terdiri dari:

a. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
b. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
c. Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau;
d. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau;
e. Pemerintah Kota Tanjungpinang;
f. Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang
g. Pemerintah Kabupaten Bintan;
h. Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan;
i. PT. Aneka Tambang Tbk.

Tugas utama dari Tim tersebut diatas adalah untuk menyelesaikan permasalahan atas lahan yang dikuasai oleh pihak lain sehingga status terhadap lahan tersebut menjadi jelas.

7.5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	2.213.822.502.843,21	**2.115.169.411.496,30**

Peralatan dan Mesin mencakup mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor, peralatan lainnya yang nilainya signifikan serta masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap. Batasan jumlah pengeluaran yang dapat dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya, namun harus diterapkan secara konsisten. Komponen Biaya Perolehan aset tetap peralatan dan mesin meliputi pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo awal aset tetap Peralatan dan Mesin per 1 Januari 2025 sebesar Rp2.115.169.411.496,30 dengan mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.194 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025

ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN				
I		**Saldo Awal ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN, 1 Januari 2025**		**2.115.169.411.496,30**

ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN				
II	**Penambahan :**			
	1	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025	81.499.424.632,00	
	2	Mutasi Tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar OPD	5.472.732.567,00	
	3	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Ekstrakomptabel	650.000,00	
	4	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.896.129,00	
	5	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Lainnya	183.637.089,00	
	6	Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Barang dan Jasa	1.223.573.776,26	
	7	Koreksi Kurang Catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin	558.187.500,00	
	8	Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Utang Belanja (Tunda Bayar 2025)	4.550.677.506,00	
	9	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Lain-lain BLUD	272.146.000,00	
	10	Penerimaan Hibah Aset Tetap Peralatan Dan Mesin dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya	46.144.156.095,65	
	11	Kapitalisasi dari Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	124.419.489,00	
	12	Koreksi terkait Hibah CSR	250.177.000,00	
	Total Penambahan :			**140.304.677.783,91**
III	**Pengurangan :**			
	1	Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar OPD	5.472.732.567,00	
	2	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin kedalam Beban Barang dan Jasa	86.053.937,00	
	3	Koreksi Kurang Catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel	8.216.653.430,00	
	4	Reklasifikasi keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban Pemeliharaan	132.330.850,00	
	5	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain	15.158.609.321,00	
	6	Pelunasan Utang Belanja Tahun 2024	9.805.319.060,00	
	7	Penghapusan BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin	292.985.272,00	
	8	Mutasi Keluar atas Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin	2.441.277.000,00	
	9	Koreksi terkait Temuan BPK Atas Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Potensi Kelebihan Pembayaran	45.625.000,00	
	Total Pengurangan			**41.651.586.437,00**
IV	**Saldo Akhir ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN, 31 Desember 2025**			**2.213.822.502.843,21**

Berdasarkan tabel mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp140.304.677.783,91 berasal dari:
   1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 sebesar Rp81.499.424.632,00 antara lain:
      a. Dinas Pendidikan sebesar Rp33.195.037.483,00
      b. Dinas Kesehatan sebesar Rp322.620.699,00

c. Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp8.781.904.053,00
d. Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp15.248.853.800,00
e. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp360.315.351,00
f. Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman sebesar Rp1.800.833.712,00
g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp1.320.445.701,00
h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebesar Rp369.833.000,00
i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp47.663.499,00
j. Dinas Sosial sebesar Rp320.889.570,00
k. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar Rp1.282.128.900,00
l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp322.712.290,00
m. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp692.415.641,00
n. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp468.693.860,00
o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp14.576.000,00
p. Dinas Perhubungan sebesar Rp73.058.520,00
q. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp235.397.999,00
r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp70.301.103,00
s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp3.030.300,00
t. Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp155.980.000,00
u. Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan sebesar Rp44.222.200,00
v. Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp352.144.851,00
w. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp83.534.300,00
x. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.271.046.429,00
y. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebesar Rp4.390.000,00
z. Biro Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp60.051.000,00
aa. Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp21.983.550,00
bb. Biro Perekonomian dan Pembangunan sebesar Rp4.384.500,00
cc. Biro Administrasi Pimpinan sebesar Rp20.442.594,00
dd. Biro Umum sebesar Rp6.250.926.144,00
ee. Biro Hukum sebesar Rp62.472.550,00
ff. Inspektorat Daerah sebesar Rp830.963.057,00
gg. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp998.620.070,00
hh. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.401.871.119,00
ii. Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri sebesar Rp344.076.997,00
jj. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp1.128.377.850,00

kk. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp63.825.000,00
ll. Sekretariat DPRD sebesar Rp2.967.983.000,00
mm. Badan Penghubung Daerah sebesar Rp501.417.940,00

2. Mutasi Masuk antar OPD Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.472.732.567,00 antara lain:
   a. Mutasi BMD tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 02/BAP-ASET/X/2025 berupa Kendaraan Roda 4 Toyota Fortuner 2.7 SRZ BP 1026 A Tanggal 20 Oktober 2025 pada Inspektorat Daerah sebesar Rp563.400.000,00
   b. Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran berdasarkan BAST Nomor 01/BAST/PENGALIHAN ASET/SAT PP/VI/2025 Tanggal 25 Juni 2025 berupa Kendaraan Roda 4 Innova Zenix 2.0 V HV CVT BP 1918 AA, *Handy Talky* dan *Tablet Apple* IPAD Pro 128 Gb pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp526.550.000,00
   c. Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan BAST Nomor 01/BAST/IX/2025 Tanggal 29 September 2025 berupa Tablet PC Ipad Air 3 2019 64 GB pada Dinas Pariwisata sebesar Rp10.065.000,00
   d. Pada Badan Penghubung sebesar Rp602.690.909,00 antara lain:
      1) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan BAST Nomor BAST 02/BA-ST/VI/2025 Tanggal 25 Juni 2024 berupa Kendaraan Roda 4 Toyota Kijang Innova G A/T BP 1130 A sebesar Rp188.090.909,00
      2) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor BAST 01/BA-ST/I/2025 Tanggal 13 Januari 2025 berupa Kendaraan Roda 4 Toyota Zenix 2.0 G CVT BP 1445 A sebesar Rp414.600.000,00
   e. Mutasi Masuk BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Roda 4 Toyota Hilux Pick Up STD 4x2 BP 8105 A dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah berdasarkan BAST Nomor B/000.2.4/1/B.PEMDA-SET/2025 Tanggal 14 Juli 2025 pada Biro Perekonomian dan Pembangunan sebesar Rp150.450.000,00
   f. Mutasi Masuk BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Umum Sekretariat Daerah berdasarkan BAST Nomor 04/ BA-ST/IX/2025 Tanggal 8 September 2025 berupa Kendaraan Roda 4 Toyota Kijang Innova G A/T BP 1687 A pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp211.070.200,00
   g. Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Dinas Sosial berupa Kendaraan Roda 4 Honda/CRV 1.5 Turbo BP 1148 A berdasarkan BAST Nomor 000.2.3.2/85/DINSOS/2025 Tanggal 26 Mei 2025 pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp569.000.000,00

h. Pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.106.416.458,00 antara lain:
   1) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Umum Sekretariat Daerah berdasarkan BAST Nomor 01/BAP-ASET/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 berupa Kendaraan roda 4 Isuzu -NQR 71 EC BP 7035 A sebesar Rp736.450.000,00
   2) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Umum Sekretariat Daerah berdasarkan BAST Nomor 01/BAP-ASET/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 berupa Kendaraan roda 4 Mitsubishi Colt Diesel FE 84 G BC BP 7508 A sebesar Rp441.940.458,00
   3) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Umum Sekretariat Daerah berdasarkan BAST Nomor 01/BAP-ASET/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 berupa Kendaraan roda 4 Isuzu -NQR 71 EC BP 7034 A sebesar Rp736.450.000,00
   4) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Umum Sekretariat Daerah berdasarkan BAST Nomor 01/BAP-ASET/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 berupa Kendaraan roda 4 KIA Pregio MT BM 1022 EP/BP 1762 A sebesar Rp191.576.000,00

i. Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Sebesar Rp449.190.000,00 antara lain:
   1) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah berdasarkan BAST Nomor 01/BAP-ASET/X/2025 berupa Toyota Innova - BP 1199 A Tanggal 13 Oktober 2025 sebesar Rp251.050.000,00
   2) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah berdasarkan BAST Nomor B/000.2.4/10/B.PEMDA/2025 berupa Toyota New Avanza 1.3 G - BP 1310 A Tanggal 14 Juli 2025 sebesar Rp176.150.000,00
   3) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 01/BAST-BPPP/2025 berupa Tablet P.C Tanggal 26 Mei 2025 sebesar Rp21.990.000,00

j. Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 02/BAST/ XII/ 2024 tanggal 27 Desember 2024 Toyota Avanza BP 1442 A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp283.900.000,00.

3. Reklasifikasi dari Aset Ekstrakomptabel ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (*Handy Talky*) untuk dimutasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebesar Rp650.000,00
4. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Modal Instalasi Listrik (Pengadaan Rangka Besi

Baliho/Spanduk) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp24.896.129,00

5. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp183.637.089,00 yang berasal dari Belanja BOSP Tahun 2026 sebesar Rp80.777.089,00 dan Pengadaan *Marching Band* SMAN 29 Batam pada Dinas pendidikan sebesar Rp102.860.000,00
6. Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Barang dan Jasa sebesar Rp1.223.573.776,26 antara lain:
    a. Kapitalisasi dari Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Partisi dan Meja Resepsionis) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp199.800.000,00
    b. Kapitalisasi dari Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (*Camila Relaxing Chair Sofabed* Multifungsi) pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp2.843.820,00
    c. Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp333.176.864,26 antara lain:
        1) Kapitalisasi dari Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Partisi dan Backdrop) sebesar Rp167.328.364,26
        2) Kapitalisasi dari Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian berupa Gerobak Sampah sebesar Rp3.263.400,00
        3) Kapitalisasi dari Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Lemari Besi/ Metal, Meja Kerja Bangku, Karpet Mushola, Meja Kerja Las, Meja Pemotongan Plat, Podium) sebesar Rp162.585.100,00
    d. Kapitalisasi dari Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer berupa *External Hardisk* pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp2.940.000,00
    e. Kapitalisasi dari Beban Bahan Untuk Kegiatan kantor lainnya berupa Kipas Angin kedalam Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib sebesar Rp49.955.994,00
    f. Kapitalisasi dari Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Papan Nama Instansi) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp138.945.000,00
    g. Kapitalisasi dari Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (sofa) ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp13.764.000,00
    h. Pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp274.020.000,00 antara lain:
        1) Kapitalisasi dari Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Partisi) sebesar Rp206.500.000,00
        2) Kapitalisasi dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp67.520.000,00
    i. Pada Dinas Pendidikan sebear Rp208.128.098,00 antara lain:
        1) Kapitalisasi dari Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Karpet dan Kursi Ruang Tunggu) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp64.407.000,00

2) Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana BOSP ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp143.721.098,00

7. Koreksi Kurang Catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp558.187.500,00 antara lain:
   a. Koreksi Kurang Catat atas Belanja Bahan Pendukung Tahun 2013 (Untuk diserahkan ke Pihak ketiga) berupa Mesin Kapal pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp545.600.000,00
   b. Koreksi Kurang Catat atas Temuan Inspektorat Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 (SMKN 4 Tanjungpinang) sebesar Rp12.587.500,00
8. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Utang Belanja (Tunda Bayar 2025) sebesar Rp4.550.677.506,00 antara lain:
   a. Utang Belanja Modal Pembuatan Tenda Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp298.853.625,00
   b. Utang Belanja Modal *Personal Computer* (laptop) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun 2025 pada Inspektorat Daerah sebesar Rp83.400.001,00
   c. Utang Belanja Modal *Personal Computer* Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (2 Unit Laptop dan 2 Unit P.C) sebesar Rp81.600.001,00
   d. Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp70.815.000,00 antara lain:
      1) Utang Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Honda ADV 160 ABS) sebesar Rp39.930.000,00
      2) Utang Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Honda Vario 160 ABS) sebesar Rp30.885.000,00
   e. Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp157.264.800,00 antara lain:
      1) Utang Belanja Modal Personal Komputer sebesar Rp86.602.200,00
      2) Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga (*Home use*) sebesar Rp11.710.500,00
      3) Utang Belanja Modal Mebel sebesar Rp13.453.200,00
      4) Utang Belanja Modal AC sebesar Rp20.468.400,00
      5) Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebesar Rp25.030.500,00
   f. Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp42.957.000,00 antara lain:
      1) Utang Belanja Modal Personal Komputer Lainnya (Printer) sebesar Rp10.545.000,00
      2) Utang Belanja Modal Personal Komputer Lainnya (PC-Laptop) sebesar Rp32.412.000,00
   g. Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp110.115.108,00 antara lain:
      1) Utang Belanja Modal Alat Pendingin (AC Split 2PK) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp40.515.000,00

2) Utang Belanja Modal Alat Pendingin Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp69.600.108,00

h. Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp97.435.800,00 antara lain:
   1) Utang Belanja Modal Pengadaan Tenda Kerucut 3x3 Meter sebesar Rp22.427.550,00
   2) Utang Belanja Modal Pengadaan *Sound System* sebesar Rp20.962.350,00
   3) Utang Belanja Modal Pengadaan Tenda Kerucut 5x5 Meter sebesar Rp44.888.400,00
   4) Utang Belanja Modal Pengadaan Kabel Roll 100 Meter sebesar Rp9.157.500,00

i. Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp33.189.000,00 antara lain:
   1) Utang Belanja Modal *Personal Computer* (Laptop) Sebesar Rp17.094.000,00
   2) Utang Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (Kamera Digital) Sebesar Rp16.095.000,00

j. Utang Belanja Modal *Personal Computer* (Laptop) pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib sebesar Rp55.611.000,00

k. Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp116.422.350,00 antara lain:
   1) Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya (Neraca Analitik, *Water Sample*) sub kegiatan pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi UPTD Laboratorium sebesar Rp62.160.000,00
   2) Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya (*Logic Probe*) sub kegiatan pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi UPTD Laboratorium sebesar Rp54.262.350,00

l. Utang Belanja Modal *Personal Computer* (Laptop dan Komputer) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp74.250.001,00

m. Utang Belanja Modal *Personal Computer* Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Dinas Kesehatan sebesar Rp49.950.000,00

n. Pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp552.058.630,00 antara lain:
   1) Utang Belanja Modal *Personal Computer* (PC Unit) pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah sebesar Rp136.132.000,00
   2) Utang Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* (Printer) pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah sebesar Rp72.840.000,00
   3) Utang Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* (Printer Pusat) pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp28.620.000,00
   4) Utang Belanja Modal *Personal Computer* pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp91.150.000,00

5) Utang Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Rak Besi) pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel sebesar Rp106.500.000,00
6) Utang Belanja Modal Personal Computer (PC Unit Tanjung Batu dan Bintan) sebesar Rp53.316.630,00
7) Utang Belanja Modal Komputer Unit Lainnya (Laptop Batam) pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp37.700.000,00
8) Utang Belanja Modal *Personal Computer* (Tablet PC Pusat) pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp25.800.000,00

o. Pada Dinas Perhubungan sebesar Rp446.480.850,00 antara lain:
1) Utang Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar pada Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan APJ/LPJU di Natuna Rp315.240.000,00
2) Utang Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar pada Pekerjaan Pembangunan Jalur Sepeda di Kota Tanjungpinang (Lanjutan) TA 2025 Rp131.240.850,00

p. Utang Belanja Modal Alat Pendingin pada Biro Umum sebesar Rp138.500.000,00

q. Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.141.774.340,00 antara lain:
1) Utang Belanja Modal Pengadaan *Meubelair* pada SMAN 1 Seluan sebesar Rp64.757.400,00
2) Utang Belanja Modal Peralatan Jaringan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp21.040.000,00
3) Utang Belanja Modal Meja Rapat Pejabat - Meja Rapat Pejabat Sub Kegiatan Pengadaan *Meubelair* sebesar Rp29.415.000,00
4) Utang Belanja Modal Pekerjaan Pengadaan *Meubelair* Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 11 Batam (NON ASTACITA) sebesar Rp159.160.000,00
5) Utang Belanja Modal Pengadaan Alat Praktik Siswa KK-Teknik Elektronika Industri SMKN 11 Batam sebesar Rp500.721.000,00
6) Utang Belanja Modal Pengadaan Alat Praktik Siswa KK-Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN 11 Batam sebesar Rp501.720.000,00
7) Utang Belanja Modal Pekerjaan Pengadaan *Meubelair* Ruang Kepala Sekolah dan Tata Usaha SMKN 1 Lingga sebesar Rp90.001.020,00
8) Utang Belanja Modal *Meubelair* SLB Negeri 2 Batam sebesar Rp199.150.000,00
9) Utang Belanja Modal Pengadaan *Meubelair* SMAN 7 Tanjungpinang sebesar Rp95.615.400,00
10) Utang Belanja Modal Pengadaan *Meubelair* SMAN 1 Bintan Utara sebesar Rp98.000.000,00
11) Utang Belanja Modal Personal Komputer sebesar Rp42.992.520,00
12) Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin sub kegiatan pengadaan peralatan mesin lainnya sebesar Rp326.215.000,00
13) Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebesar Rp12.987.000,00

9. Reklasifikasi dari Aset Lain-lain BLUD ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp272.146.000,00
10. Penerimaan Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya sebesar Rp46.144.156.095,65 antara lain:
    a. Penerimaan Hibah dari Kementerian Kesehatan berdasarkan BAST Nomor KN.01.08/C1/9364/2024 Tanggal 20 Desember 2024 pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp1.310.000.000,00
    b. Penerimaan Hibah dari Kementerian Kesehatan berdasarkan BAST Nomor KN.02.07/I/2114/2022 Tanggal 22 Mei 2025 pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib sebesar Rp37.404.701.098,00
    c. Penerimaan Hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan BAST Nomor B.1384/ PSDKP.1/PL.450/ III/2025 Tanggal 24 Maret 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp197.377.000,00
    d. Penerimaan Hibah dari Bank Bukopin cabang Batam berdasarkan BAST Nomor 001/BAST/2025 Tanggal 2 Januari 2025 berupa Kendaraan Roda 4 Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate - L 4 X 2 A/T BP 1447 A pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp316.300.000,00
    e. Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp6.915.777.997,65 antara lain:
        1) Penerimaan Hibah Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMK dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN Non BLUD) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp423.500.000,00
        2) Penerimaan Hibah Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMA dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMAN) sebesar Rp2.111.335.199,65
        3) Penerimaan Hibah dari Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) sebesar Rp64.485.698,00
        4) Koreksi pengakuan pendapatan dan belanja yang bersumber dari program revitalisasi pendidikan dasar dan menengah dan bantuan pemerintah lainnya sebesar Rp4.316.457.100,00
11. Kapitalisasi dari Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp124.419.489,00 antara lain:
    a. Kapitalisasi dari Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi (1 Unit Printer) pada Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri sebesar Rp13.199.999,00
    b. Kapitalisasi dari Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp39.450.000,00 antara lain:

1) Kapitalisasi dari Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan (*Router Mikrotik/Cloude Core Series*/ CCR2116-12G-4S+) sebesar Rp17.500.000,00
2) Kapitalisasi dari Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah (DRONE DJI / DJI MINI 4 PRO DRONE COMBO PLUS (RC 2) sebesar Rp21.950.000,00

c. Kapitalisasi dari Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp32.492.790,00 antara lain:
1) Kapitalisasi dari Belanja Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi - Alat Kantor Lainnya (Teralis) sebesar Rp16.516.800,00
2) Kapitalisasi dari Belanja Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi - Peralatan Studio Audio (*Microphone wireless* sebesar Rp990.990,00
3) Kapitalisasi dari Belanja Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi - Peralatan Studio Video dan Film (*Bateray Pack Camera*, Lampu Blitz Kamera, Lensa Kamera,Tripod Camera) sebesar Rp14.985.000,00

d. Kapitalisasi dari Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp39.276.700,00 antara lain:
1) Kapitalisasi dari Utang Belanja (Tunda Bayar) Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film (CCTV - *Camera Control Television System*) sebesar Rp23.276.700,00
2) Kapitalisasi dari Utang Belanja (Tunda Bayar) Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi berupa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-Lain sebesar Rp16.000.000,00

12. Koreksi kurang catat hibah CSR Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp250.177.000,00 yang bersumber dari:
a. Hibah CSR dari PT PLN Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau berupa PC Unit berdasarkan BAST Nomor 1826.BA/CSR.00.01/F1000000/2024 Tanggal 25 April 2024 pada SMKN 2 Lingga - Dinas Pendidikan sebesar Rp170.177.000,00.
b. Hibah CSR dari Universitas International Batam berdasarkan BAST Nomor 422/030/SMKN10 BTM/2025 Tanggal 25 April 2025 berupa PC sebanyak 32 Unit pada SMKN 10 Batam sebesar Rp80.000.000,00.

B. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp41.651.586.437,00 berasal dari:
1. Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar OPD sebesar Rp5.472.732.567,00 antara lain:

a. Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Biro Umum Sekretariat Daerah berdasarkan BAST Nomor 01/BAST-BPPP/2025 Tanggal 26 Mei 2025 (1 Unit Tablet PC) pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp21.990.000,00
b. Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Kendaraan Roda 4 Honda/CRV 1.5 Turbo BP 1148 A) berdasarkan BAST Nomor 000.2.3.2/85/DINSOS/2025 Tanggal 26 Mei 2025 pada Dinas Sosial sebesar Rp569.000.000,00
c. Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Dinas Pariwisata berdasarkan BAST Nomor 01/BAST/IX/2025 Tanggal 29 September 2025 (Tablet PC Ipad Air 3 2019 64 GB) pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp10.065.000,00
d. Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Biro Umum Sekretariat Daerah berdasarkan BAST Nomor 01/BAP-ASET/X/2025 Tanggal 13 Oktober 2025 berupa Kendaraan Roda 4 Toyota Innova BP 1199 A pada Biro Perekonomian dan Pembangunan sebesar Rp251.050.000,00
e. Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebesar Rp326.600.000,00 antara lain:
    1) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Biro Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah berdasarkan BAST Nomor B/000.2.4/1/B.PEMDA-SET/2025 Tanggal 14 Juli 2025 berupa kendaraan Roda 4 Toyota Hilux *Pick Up* STD 4x2 - BP 8105 A Daerah sebesar Rp150.450.000,00
    2) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Biro Umum Sekretariat Daerah berdasarkan BAST Nomor B/000.2.4/10/B.PEMDA-SET/2025 Tanggal 5 Juni 2025 berupa Kendaraan Roda 4 Toyota New Avanza 1.3 G - BP 1310 A sebesar Rp176.150.000,00
f. Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebesar Rp526.550.000,00 antara lain:
    1) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 01/BAST/PENGALIHAN ASET/SAT PP/VI/2025 Tanggal 25 Juni 2025 berupa kendaraan Roda 4 Toyota Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista sebesar Rp508.800.000,00
    2) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 01/BAST/PENGALIHAN ASET/SAT PP/VI/2025 Tanggal 25 Juni 2025 berupa *Handy Talky* (Harve W89) sebesar Rp650.000,00
    3) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 01/BAST/PENGALIHAN ASET/SAT PP/VI/2025 Tanggal 25 Juni 2025 berupa Apple/IPAD PRO WIFI ONLY 128 Gb sebesar Rp17.100.000,00

g. Pada Biro Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp3.767.477.567,00 antara lain:
    1) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Inspektorat Daerah berdasarkan BAST Nomor 02/BAP-ASET/X/2025 (Kendaraan Roda 4 Toyota Fortuner 2.7 SRZ BP 1026 A) Tanggal 20 Oktober 2025 sebesar Rp563.400.000,00
    2) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Badan Penghubung Daerah berdasarkan BAST Nomor 02/BA-ST/VI/2025 Tanggal 25 Juni 2024 berupa Kendaraan Roda 4 Toyota Kijang Innova G A/T BP 1130 A sebesar Rp188.090.909,00
    3) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Badan Penghubung Daerah berdasarkan BAST Nomor 01/BA-ST/I/2025 Tanggal 13 Januari 2025 berupa Kendaraan Roda 4 Toyota Zenix 2.0 G CVT BP 1445 A sebesar Rp414.600.000,00
    4) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan BAST Nomor 04/BA-ST/IXI 2025 Tanggal 8 September 2025 berupa Kendaraan Roda 4 Toyota Kijang Innova G A/T BP 1687 A sebesar Rp211.070.200,00
    5) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Badan Pendapatan Daerah berdasarkan BAST Nomor 01/BAP-ASET/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 berupa Kendaraan roda 4 Isuzu -NQR 71 EC BP 7035 A sebesar Rp736.450.000,00
    6) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Badan Pendapatan Daerah berdasarkan BAST Nomor 01/BAP-ASET/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 berupa Kendaraan roda 4 Mitsubishi Colt Diesel FE 84 G BC BP 7508 A sebesar Rp441.940.458,00
    7) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Badan Pendapatan Daerah berdasarkan BAST Nomor 01/BAP-ASET/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 berupa Kendaraan roda 4 Isuzu -NQR 71 EC BP 7034 A sebesar Rp736.450.000,00
    8) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Badan Pendapatan Daerah berdasarkan BAST Nomor 01/BAP-ASET/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 berupa Kendaraan roda 4 KIA Pregio MT BM 1022 EP/BP 1762 A sebesar Rp191.576.000,00
    9) Mutasi BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan BAST Nomor 02/BAST/XII/ 2024 tanggal 27 Desember 2024 Toyota Avanza BP 1442 A sebesar Rp283.900.000,00

2. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp86.053.937,00 antara lain:
    a. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp82.075.017,00
    b. Pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp3.978.920,00 antara lain:

1) Reklasifikasi Aset Tetap peralatan dan Mesin ke Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp2.900.000,00
2) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp1.078.920,00

3. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp8.216.653.430,00 antara lain:
   a. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Inspektorat Daerah sebesar Rp4.600.000,00
   b. Reklasifikasi Aset Tetap peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp650.000,00
   c. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp3.108.000,00
   d. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp666.000,00
   e. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp33.990.000,00
   f. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Biro Perekonomian dan Pembangunan sebesar Rp4.384.500,00
   g. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp30.482.701,00
   h. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp2.979.000,00
   i. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp2.940.000,00
   j. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp8.073.901,00
   k. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebesar Rp1.542.900,00
   l. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp166.163.954,00 antara yang bersumber dari:
      1) Aset Ekstrakomptabel yang bersumber dari BLUD sebesar Rp57.182.654,00
      2) Aset Ekstrakomptabel bersumber dari APBD sebesar Rp83.416.500,00
      3) Aset Ekstrakomptabel bersumber dari Hibah Kementerian Kesehatan sebesar Rp25.564.800,00
   m. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp13.326.660,00
   n. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp25.666.290,00

o. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.063.700,00
p. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp10.077.200,00
q. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Perhubungan sebesar Rp612.720,00
r. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Biro Umum sebesar Rp361.438.644,00
s. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp7.516.363.750,00 yang bersumber dari:
    1) Aset Ekstrakomptabel yang bersumber dari APBD sebesar Rp1.948.634.610,00
    2) Aset Ekstrakomptabel yang bersumber dari BOSP sebesar Rp4.001.753.322,00
    3) Aset Ekstrakomptabel yang bersumber dari BLUD sebesar Rp421.144.240,00
    4) Aset Ekstrakomptabel yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMKN Non BLUD sebesar Rp330.927.380,00
    5) Aset Ekstrakomptabel yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Pogram Revitalisasi SMAN sebesar Rp773.718.500,00
    6) Aset Ekstrakomptabel yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SLB sebesar Rp40.185.698,00
t. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp7.677.360,00
u. Koreksi kurang catat Aset Ekstrakomptabel yang bersumber dari Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp18.846.150,00 antara lain yaitu Hibah Aset dari PT PLN Unit Induk Distribusi Riau dan Kepri sebesar Rp4.966.150,00 berdasarkan BAST Nomor 1826.BA/CSR.00.01/F1000000/2024 Tanggal 25 April 2024 pada SMKN 2 Lingga dan Hibah Aset dari PT. Agung Automall sebesar Rp13.880.000,00 berdasarkan BAST Nomor 0173/AT-BTC/XII/2025 Tanggal 28 Mei 2025 pada SMAN 26 Batam.

4. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp132.330.850,00 antara lain:
    a. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban Pemeliharaan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebesar Rp1.090.000,00
    b. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban Pemeliharaan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp131.240.850,00
5. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain sebesar Rp15.158.609.321,00 antara lain:
    a. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain atas usulan pemusnahan pada Inspektorat Daerah sebesar Rp258.038.100,00

b. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain atas usulan pemusnahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp596.776.018,00
c. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya berdasarkan usulan penjualan Barang Milik Daerah pada Dinas Sosial sebesar Rp313.488.000,00
d. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnnya Akibat usulan pemusnahan Barang Milik Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp387.747.484,00
e. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya akibat usulan pemusnahan Barang Milik Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp859.659.000,00
f. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan pemusnahan Barang Milik Daerah pada Dinas Pariwisata sebesar Rp37.053.500,00
g. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat Usulan Pemusnahan Barang Milik Daerah pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp54.620.000,00
h. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan penjualan BMD Rusak Berat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp500.000.000,00
i. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya akibat usulan pemusnahan Barang Milik Daerah pada Biro Administrasi Pimpinan Rp732.349.200,00
j. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan penghapusan Barang Milik Daerah hasil inventarisasi tidak diketemukan pada Biro Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp471.934.380,00
k. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat usulan pemusnahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp350.443.360,00
l. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat usulan pemusnahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp200.991.500,00
m. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat usulan penghapusan Kendaraan Eks Riau pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.018.936.230,00
n. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat usulan penghapusan pada Biro Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp9.141.218.549,00
o. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat Usulan Pemusnahan pada Kuasa Pengguna Barang Dinas Pendidikan (SMK Negeri 1 Tanjungpinang) sebesar Rp235.354.000,00

6. Pelunasan Utang Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.805.319.060,00 antara lain :
    a. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp2.923.250.000,00
    b. Pelunasan Utang Belanja Pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp642.000.000,00
    c. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp14.576.000,00
    d. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp79.650.000,00
    e. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp613.025.000,00
    f. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp77.285.000,00
    g. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp536.550.000,00
    h. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp277.685.000,00
    i. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp976.826.960,00
    j. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp11.700.000,00
    k. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp16.430.000,00
    l. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp20.800.000,00
    m. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Biro Administrasi Pimpinan sebesar Rp12.045.000,00
    n. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Biro Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp34.410.000,00
    o. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebesar Rp336.100.100,00
    p. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp342.192.000,00
    q. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp80.450.000,00

r. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp22.140.000,00
s. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp156.700.000,00
t. Pelunasan Utang Belanja Modal Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp77.799.500,00
u. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp681.690.000,00
v. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Biro Umum sebesar Rp1.113.100.000,00
w. Pelunasan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp758.914.500,00

7. Penghapusan BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp292.985.272,00 antara lain:
   a. Penghapusan BMD karena Hilang/Kecurian berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp49.300.000,00
   b. Penghapusan BMD karena Hilang/Kecurian berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 pada Badan Penghubung Daerah sebesar Rp14.520.000,00
   c. Penghapusan BMD karena Hilang/Kecurian berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 pada Biro Administrasi Pimpinan sebesar Rp84.753.000,00
   d. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp56.803.952,00
   e. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp31.207.820,00
   f. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp9.550.000,00
   g. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp21.087.000,00
   h. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 pada Dinas Sosial sebesar Rp25.763.500,00
8. Mutasi Keluar atas Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.441.277.000,00 antara lain:

a. Hibah BMD ke Koperasi Serba Usaha Nelayan Bintan berdasarkan BAST Nomor B/000.2.3.2/608.1/BKAD-SET/2025 Tanggal 4 Juli 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp197.377.000,00 yang berasal dari Hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan BAST Nomor B.1384/ PSDKP.1/PL.450/ III/2025 Tanggal 24 Maret 2025

b. Hibah BMD pada Biro Umum berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Pemerintah Kota Batam berdasarkan BAST Nomor B/000.2.3.2/476.3/BKAD-SET/2025, Nomor 159.1/900.1.4.3/V/2025 Tanggal 19 Mei 2025 sebesar Rp2.243.900.000,00

9. Koreksi terkait Temuan BPK atas Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Potensi Kelebihan Pembayaran sebesar Rp45.625.000,00 antara lain:
   a. Koreksi kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Mebel pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp3.567.000,00
   b. Koreksi kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Kedokteran Lainnya dan Alat Kedokteran Umum sebesar Rp42.058.000,00 (Rp18.550.000,00+Rp23.508.000,00) sebelum pajak, sebagai akibat dari kekurangan volume pekerjaan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud.

C. Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan Mesin per 31 Desember 2025 senilai Rp2.213.822.502.843,21.

Adapun rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per OPD dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.5.195 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Pendidikan	686.062.853.497,19	33.195.037.483,00	9.712.082.024,65	8.529.478.400,00	720.440.494.604,84
Dinas Kesehatan	58.699.827.050,60	322.620.699,00	49.950.000,00	80.863.200,00	58.991.534.549,60
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	331.051.512.639,53	8.781.904.053,00	37.510.268.092,00	508.355.954,00	376.835.328.830,53
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	116.463.863.670,00	15.248.853.800,00	1.582.146.000,00	661.898.000,00	132.632.965.470,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	30.155.324.458,00	360.315.351,00	112.910.130,00	156.700.000,00	30.471.849.939,00
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	6.120.651.155,00	1.800.833.712,00	0,00	976.826.960,00	6.944.657.907,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.511.884.483,00	1.320.445.701,00	81.600.001,00	1.238.776.018,00	6.675.154.167,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	9.635.095.435,00	369.833.000,00	650.000,00	864.193.000,00	9.141.385.435,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.555.034.289,00	47.663.499,00	0,00	14.679.000,00	15.588.018.788,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
Dinas Sosial	4.883.779.575,00	320.889.570,00	0,00	908.251.500,00	4.296.417.645,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	4.211.238.539,00	1.282.128.900,00	654.362.172,26	308.167.701,00	5.839.561.910,26
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.976.713.686,00	322.712.290,00	852.900.000,00	380.260.720,00	6.772.065.256,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	35.453.856.451,50	692.415.641,00	199.385.320,00	613.691.000,00	35.731.966.412,50
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	20.325.615.875,76	468.693.860,00	255.367.350,00	245.525.980,00	20.804.151.105,76
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.214.707.007,00	14.576.000,00	0,00	14.576.000,00	9.214.707.007,00
Dinas Perhubungan	46.314.050.252,51	73.058.520,00	446.480.850,00	141.403.570,00	46.692.186.052,51
Dinas Komunikasi dan Informatika	22.217.615.023,00	235.397.999,00	566.000.000,00	478.112.484,00	22.540.900.538,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.202.708.150,00	70.301.103,00	0,00	28.873.901,00	5.244.135.352,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.580.327.872,00	3.030.300,00	0,00	0,00	8.583.358.172,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10.775.999.553,00	155.980.000,00	100.375.800,00	519.370.000,00	10.512.985.353,00
Dinas Kebudayaan	10.729.084.113,70	0,00	0,00	54.620.000,00	10.674.464.113,70
Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	20.403.870.992,00	44.222.200,00	33.189.000,00	0,00	20.481.282.192,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	69.887.986.380,53	352.144.851,00	742.977.000,00	416.705.969,00	70.566.402.262,53
Dinas Pariwisata	5.838.856.913,00		10.065.000,00	37.053.500,00	5.811.868.413,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10.278.255.064,10	83.534.300,00	42.957.000,00	77.285.000,00	10.327.461.364,10
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.870.079.126,00	1.271.046.429,00	70.815.000,00	866.334.000,00	9.345.606.555,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.358.171.355,00	4.390.000,00	0,00	327.690.000,00	4.034.871.355,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	4.270.671.869,00	60.051.000,00	0,00	506.344.380,00	3.824.378.489,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	5.925.732.407,06	21.983.550,00	0,00	0,00	5.947.715.957,06
Biro Perekonomian dan Pembangunan	5.026.034.102,00	4.384.500,00	150.450.000,00	255.434.500,00	4.925.434.102,00
Biro Organisasi	2.284.625.225,00	0,00	0,00	0,00	2.284.625.225,00
Biro Administrasi Pimpinan	11.242.699.570,50	20.442.594,00	0,00	829.147.200,00	10.433.994.964,50
Biro Umum	292.634.730.416,00	6.250.926.144,00	587.690.000,00	16.627.134.760,00	282.846.211.800,00
Biro Hukum	2.182.409.807,00	62.472.550,00	0,00	0,00	2.244.882.357,00
Inspektorat Daerah	12.875.154.194,20	830.963.057,00	646.800.001,00	262.638.100,00	14.090.279.152,20
Badan Keuangan dan Aset Daerah	26.702.472.886,00	998.620.070,00	348.792.790,00	1.044.602.520,00	27.005.283.226,00
Badan Pendapatan Daerah	55.529.240.819,95	1.401.871.119,00	2.932.495.088,00	695.746.120,00	59.167.860.906,95
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	8.443.692.873,00	344.076.997,00	13.199.999,00	0,00	8.800.969.869,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.479.872.448,67	1.128.377.850,00	199.800.000,00	0,00	5.808.050.298,67
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14.129.434.752,50	63.825.000,00	0,00	21.990.000,00	14.171.269.752,50
Sekretariat DPRD	86.480.456.210,00	2.967.983.000,00	298.853.625,00	2.944.337.000,00	86.802.955.835,00
Badan Penghubung Daerah	18.089.738.609,00	501.417.940,00	602.690.909,00	14.520.000,00	19.179.327.458,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.093.482.700,00	0,00	0,00	0,00	1.093.482.700,00
JUMLAH	**2.115.169.411.496,30**	**81.499.424.632,00**	**58.805.253.151,91**	**41.651.586.437,00**	**2.213.822.502.843,21**

Adapun daftar kendaraan bermotor yang sudah dilengkapi BPKB dan sudah tercatat di KIB dapat dilihat di **Lampiran 6.**

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud. Masa manfaat aset tetap peralatan dan mesin ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.5.196 Masa Manfaat Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kodefikasi						Uraian	Masa Manfaat
1	3					**ASET TETAP**	
1	3	2				**Peralatan dan Mesin**	
1	3	2	01			Alat Besar	
1	3	2	01	01		Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02		Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03		Alat Bantu	7
1	3	2	02			Alat Angkutan	
1	3	2	02	01		Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03		Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04		Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05		Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	03			Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01		Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02		Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03		Alat Ukur	5
1	3	2	04			Alat Pertanian	
1	3	2	04	01		Alat Pengolahan	4
1	3	2	05			Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01		Alat Kantor	5

Kodefikasi						Uraian	Masa Manfaat
1	3	2	05	02		Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06			Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	06	01		Alat Studio	5
1	3	2	06	02		Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03		Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04		Peralatan Komunikasi Navigasi	10
1	3	2	07			Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01		Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	01	29	Alat Kedokteran Lainnya	10
1	3	2	07	02		Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08			Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01		Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03		Alat Peraga Praktik Sekolah	10
1	3	2	08	04		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	08	05		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06		Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1	3	2	08	07		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08		Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1	3	2	08	09		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	8
1	3	2	09			Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01		Senjata Api	10
1	3	2	09	02		Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	02	02	Non Senjata Api	5
1	3	2	09	03		Senjata Sinar	10
1	3	2	09	04		Alat Khusus Kepolisian	3
1	3	2	10			Komputer	
1	3	2	10	01		Komputer Unit	4
1	3	2	10	02		Peralatan Komputer	4
1	3	2	11			Alat eksplorasi	
1	3	2	11	01		Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	02		Alat Eksplorasi Geofisika	5
1	3	2	12			Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01		Alat Pengeboran Mesin	5
1	3	2	12	02		Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	3	2	13			Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	

Kodefikasi						Uraian	Masa Manfaat
1	3	2	13	01		Sumur	4
1	3	2	13	02		Produksi	4
1	3	2	13	03		Pengolahan dan Pemurnian	5
1	3	2	14			Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01		Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	02		Alat Bantu Produksi	5
1	3	2	15			Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01		Alat Deteksi	4
1	3	2	15	02		Alat Pelindung	4
1	3	2	15	03		Alat SAR	4
1	3	2	15	04		Alat Kerja Penerbangan	5
1	3	2	16			Alat Peraga	
1	3	2	16	01		Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4
1	3	2	17			Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01		Unit Peralatan Proses/Produksi	4
1	3	2	18			Rambu-rambu	
1	3	2	18	01		Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	18	02		Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	7
1	3	2	18	03		Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	7
1	3	2	19			Peralatan Olahraga	
1	3	2	19	01		Peralatan Olahraga	4

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 7.5.197 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
		1.642.323.174.603,95	**151.431.365.210,45**	**40.384.206.189,39**	**24.734.570.181,72**	**1.809.404.175.822,07**
1	Dinas Pendidikan	461.751.154.738,58	69.089.660.258,93	1.284.124.346,09	215.964.766,98	531.908.974.576,62
2	Dinas Kesehatan	55.534.725.895,32	1.161.051.263,08	0,00	0,00	56.695.777.158,40
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	245.441.457.906,49	30.067.353.149,06	34.964.044.362,63	0,00	310.472.855.418,18
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	88.830.834.734,66	10.184.816.522,51	21.965.541,65	49.300.000,00	98.988.316.798,82
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan	21.652.350.963,44	2.363.493.745,08	0,00	5.853.125,03	24.009.991.583,49

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
	Ruang dan Pertanahan					
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.499.540.131,52	580.064.215,14	0,00	212.636.907,31	4.866.967.439,35
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.271.610.009,32	543.210.406,34	0,00	792.856.629,35	5.021.963.786,31
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	7.330.668.438,01	496.588.406,91	0,00	137.888.392,92	7.689.368.452,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.967.552.594,43	249.048.233,74	0,00	13.791.259,71	15.202.809.568,46
10	Dinas Sosial	3.617.091.856,07	255.668.124,15	0,00	481.501.511,32	3.391.258.468,90
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.561.058.794,14	307.127.749,05	211.070.200,00	44.146.586,86	4.035.110.156,33
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	5.649.110.846,41	272.552.473,19	149.009.523,72	354.034.055,21	5.716.638.788,11
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	29.193.435.387,48	1.444.140.768,73	0,00	0,00	30.637.576.156,21
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17.364.314.233,08	702.946.297,90	0,00	230.879.821,09	17.836.380.709,89
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.414.591.641,48	399.114.264,39	0,00	47,73	8.813.705.858,14
16	Dinas Perhubungan	43.823.503.506,70	1.116.873.319,86	0,00	11.989.059,83	44.928.387.766,73
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.531.867.799,68	1.025.233.518,27	137.888.392,92	397.788.157,34	20.297.201.553,53
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.750.387.827,88	208.426.263,84	224,06	0,00	4.958.814.315,78
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	7.200.133.167,86	465.760.339,62	0,00	451.797,45	7.665.441.710,03
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9.581.219.713,47	673.754.012,76	38.538,00	669.037.825,82	9.585.974.438,41
21	Dinas Kebudayaan	6.119.794.584,31	1.070.900.989,97	0,00	54.620.000,00	7.136.075.574,28
22	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	19.446.273.940,42	321.369.114,66	0,00	4.078.750,51	19.763.564.304,57

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	58.868.450.191,84	2.887.959.341,32	500.764.266,49	0,00	62.257.173.799,65
24	Dinas Pariwisata	5.353.151.397,25	223.531.907,69	9.645.639,89	0,00	5.586.328.944,83
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.044.467.873,02	431.628.758,45	0,00	0,00	8.476.096.631,47
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.683.505.841,95	600.178.683,45	0,00	859.658.745,84	7.424.025.779,56
27	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.009.785.618,67	119.548.815,97	20,67	326.600.000,00	3.802.734.455,31
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	3.271.438.040,43	309.718.147,20	0,00	471.934.380,00	3.109.221.807,63
29	Biro Pengadaan Barang/Jasa	5.520.786.063,56	214.743.562,02	0,00	11.717.812,60	5.723.811.812,98
30	Biro Perekonomian dan Pembangunan	4.749.291.721,91	135.970.635,71	150.500.076,95	251.050.000,00	4.784.712.434,57
31	Biro Organisasi	1.874.499.408,33	164.712.920,00	0,00	0,00	2.039.212.328,33
32	Biro Administrasi Pimpinan	10.329.366.133,21	359.380.107,14	19.579.999,98	805.860.400,00	9.902.465.840,33
33	Biro Umum	264.125.019.705,05	7.864.526.044,92	437.278.765,83	14.048.177.068,44	258.378.647.447,36
34	Biro Hukum	1.979.979.451,42	66.232.101,88	0,00	0,00	2.046.211.553,30
35	Inspektorat	8.927.571.109,25	1.350.058.349,27	140.850.000,06	258.526.344,14	10.159.953.114,44
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	22.659.504.351,19	1.634.984.783,81	0,00	3.952.902.962,55	20.341.586.172,45
37	Badan Pendapatan Daerah	43.402.919.722,86	4.354.995.245,94	2.106.416.458,00	30.470.458,80	49.833.860.968,00
38	Badan Kepegawaian dan Korpri	7.570.403.282,45	437.721.680,79	44.931.873,03	0,00	8.053.056.836,27
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.048.934.769,59	727.177.789,02	7,29	0,00	2.776.112.565,90
40	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.040.662.351,61	841.550.958,64	7.668.917,53	10.078.750,00	12.879.803.477,78
41	Sekretariat DPRD	76.642.242.206,72	3.265.421.996,95	466.697,02	16.254.562,50	79.891.876.338,19
42	Badan Penghubung Daerah	9.298.518.505,38	2.227.521.030,90	197.962.337,58	14.520.000,00	11.709.481.873,86
43	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	389.998.147,51	214.648.912,20	0,00	2,39	604.647.057,32

7.5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	2.997.282.508.161,98	**2.878.738.414.770,81**

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Komponen Biaya Perolehan aset tetap Gedung dan Bangunan meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan yang dapat dikapitalisasi berupa:

a) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
b) Pengeluaran untuk pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
c) Pembayaran atas pembangunan gedung melalui kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan per termin. Apabila proses pembangunan gedung tersebut melampaui periode pelaporan (pertengahan dan akhir tahun), maka biaya yang telah dikeluarkan dikapitalisasi sebagai ”Konstruksi Dalam Pengerjaan”.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo awal aset tetap Gedung dan Bangunan per 1 Januari 2025 sebesar Rp2.878.738.414.770,81. Mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.198 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025

ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN				
I		**Saldo Awal ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN, 1 Januari 2025**		**2.878.738.414.770,81**
II		**Penambahan :**		
	1	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025	80.799.961.394,06	
	2	Mutasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan antar OPD	570.041.252.566,45	
	3	Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan dan Perencanaan	4.514.778.300,85	
	4	Utang Belanja (Tunda Bayar) Tahun 2025	9.272.601.642,02	
	5	Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Beban Pemeliharaan	114.721.789,00	
	6	Penerimaan Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya	44.854.357.248,83	
	7	Koreksi terkait kurang catat kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan dan Perencanaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	148.740.000,00	
	8	Koreksi Kurang Catat Hibah CSR	284.160.822,00	
		Total Penambahan :		**710.030.573.763,21**

ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN				
III	**Pengurangan :**			
	1	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.397.035.466,76	
	2	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	978.264.356,53	
	3	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain	50.000.000,00	
	4	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke dalam Beban Pemeliharaan	242.788.068,00	
	5	Mutasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan antar OPD	570.041.252.566,45	
	6	Pelunasan Utang Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024	6.638.115.345,24	
	7	Penghapusan BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan	9.153.454.625,37	
	8	Koreksi Terkait Temuan BPK Atas Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Dan Potensi Kelebihan Pembayaran	985.132.943,69	
	9	Koreksi Terkait Lebih Catat Pengakuan Aset tetap Gedung Dan Bangunan atas Hibah Bantuan Pemerintah	437.000,00	
		Total Pengurangan :		**591.486.480.372,04**
		-		
IV	**Saldo Akhir ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN, 31 Desember 2025**			**2.997.282.508.161,98**

Dari tabel mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp710.030.573.763,21 berasal dari:
   1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp80.799.961.394,06 pada :
      a. Dinas Pendidikan sebesar Rp22.250.466.178,01
      b. Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp32.941.640.000,00
      c. Dinas Kesehatan sebesar Rp17.901.215.230,00
      d. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp498.394.000,00
      e. Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman sebear Rp418.939.700,00
      f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp19.900.000,00
      g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp3.330.159.000,00
      h. Dinas Perhubungan sebear Rp3.241.022.142,77
      i. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp198.225.143,28
   2. Mutasi masuk Aset tetap Gedung dan Bangunan antar OPD sebesar Rp570.041.252.566,45 antara lain:
      a. Mutasi BMD dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan BAST Nomor 119/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 08

September 2025 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp81.935.353.456,93

b. Mutasi BMD dari Dinas Kesehatan berdasarkan BAST Nomor 1858/BA-HB/PERLK/XI/2025 Tanggal 20 November 2025 pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp7.166.475.976,00
c. Mutasi BMD dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 dan BAST Nomor 105/BAST/DPKP-PK/TL/2025 (Bangunan Gedung Kantor - Rehab Gedung Ex Asrama BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp485.305.980,00
d. Mutasi BMD dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 dan BAST Nomor 105/BAST/DPKP-PK/TL/2025 (Pematangan Lahan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial) pada Dinas Sosial sebesar Rp199.950.000,00
e. Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebesar Rp106.438.720.446,37 antara lain:
    1) Mutasi BMD dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan BAST Nomor B.17/BAST/PUPP.1/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 sebesar Rp8.085.242.999,68
    2) Mutasi BMD dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 Tanggal 16 September 2025 dan BAST Nomor 103/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 8 September 2025 sebesar Rp98.353.477.446,69
f. Mutasi BMD dari Dinas Kesehatan berdasarkan BAST Nomor 1885/BA-HB/PERLK/XI/2025 Tanggal 24 November 2025 pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp1.711.854.000,00
g. Mutasi BMD dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan BAST Nomor 109/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 08 September 2025 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp361.260.432.554,01
h. Mutasi BMD dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan BAST Nomor 107/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 08 September 2025 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp9.560.217.493,65
i. Mutasi BMD dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan BAST Nomor 104/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 08 September 2025 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001

Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.282.942.659,49

3. Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan dan Perencanaan sebesar Rp4.514.778.300,85 antara lain:
   a. Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp1.064.979.272,00 antara lain:
      1) Kapitalisasi Beban Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp969.979.272,00
      2) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Review DED BLUD ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp95.000.000,00
   b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari Utang Belanja (Tunda Bayar 2025) sebesar Rp169.636.000,00 antara lain:
      1) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan *Landscape* Gedung Kantor ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Tunda bayar 2025) sebesar Rp40.794.754,51
      2) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Interior dan Peningkatan Ruang Kantor ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Tunda Bayar 2025) sebesar Rp42.979.771,88
      3) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Sarana Pendukung Mushola dan parkir ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Tunda Bayar 2025) sebesar Rp16.025.473,61
      4) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan *Landscape* Gedung Kantor ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Tunda bayar 2025) sebesar Rp28.546.517,80
      5) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Interior dan Peningkatan Ruang Kantor ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Tunda Bayar 2025) sebesar Rp30.075.504,50
      6) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan pembangunan Sarana Pendukung Mushola dan parkir ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Tunda Bayar 2025) sebesar Rp11.213.977,70
   c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp240.155.794,00 antara lain:
      1) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur (100%) - Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi Kantor UPTD PPA ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp190.233.100,00
      2) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan DAK Fisik ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp49.922.694,00
   d. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp49.794.000,00 antara lain:
      1) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan - Jasa Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Keamanan di Taman Gurindam 12

Kota Tanjungpinang ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp29.900.000,00

2) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan - Jasa Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Keamanan di Taman Gurindam 12 Kota Tanjungpinang ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.894.000,00

e. Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan - Jasa Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Permanen (Laboratorium Kesehatan Masyarakat) ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp659.992.271,00

f. Dinas Perhubungan sebesar Rp289.711.468,58 antara lain:
   1) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Permai Kampung Beko Pulau Kasu Kota Batam ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp89.711.976,00
   2) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Permai Kampung Beko Pulau Kasu Kota Batam ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp87.232.902,00
   3) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Jagoh kabupaten Lingga ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp57.154.181,88
   4) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pengadan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Jagoh kabupaten Lingga ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp55.612.408,70

g. Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan sebesar Rp1.438.627.362,00 antara lain:
   1) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 4 Batam sebesar Rp11.821.500,00
   2) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 5 Batam sebesar Rp11.879.220,00
   3) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pemasangan *Paving Block* SMKN 2 Karimun sebesar Rp7.721.160,00
   4) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Toilet dan Semenisasi SMKN 5 Batam (ASTACITA) sebesar Rp13.858.977,00
   5) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Toilet SMKN 6 Batam (ASTACITA) sebesar Rp5.658.780,00
   6) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Batu Miring SMKN 1 Karimun sebesar Rp7.721.160,00

7) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling (BK), Ruang Praktik Siswa (RPS) Animasi, DKV, Laboratorium Kimia Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Lanjutan Pembangunan Labor Fisika dan Pembangunan UKS SMKN 9 Batam sebesar Rp106.975.140,00
8) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Toilet, *Drainase*, Ruang Kelas Baru, Pembangunan Mushola, Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Pemasangan *Paving Block* Lapangan SMKN 10 Batam (ASTACITA) sebesar Rp107.749.920,00
9) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Toilet, Semenisasi, Ruang Kelas Baru (RKB), SMKN 11 Batam (ASTACITA) sebesar Rp85.355.670,00
10) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pemasangan Awning SMKN 5 Batam sebesar Rp6.953.040,00
11) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru, Laboratorium Kimia, Laboratorium Fisika dan Laboratorium Komputer SMKN 1 Bintan Utara sebesar Rp47.635.650,00
12) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah dan Tata Usaha SMK Negeri 1 Lingga sebesar Rp5.938.500,00
13) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kepala Sekolah dan Tata Usaha SMK Negeri 2 Lingga sebesar Rp11.932.500,00
14) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Toilet SMKN 7 Batam (ASTACITA) sebesar Rp5.764.230,00
15) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Toilet SMKN 4 Tanjungpinang (ASTACITA) sebesar Rp5.997.330,00
16) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Batu Miring, Penimbunan dan Pemasangan *Paving Block* Halaman SMKN 1 Bunguran Timur Laut sebesar Rp14.912.850,00
17) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLB Negeri 2 Batam sebesar Rp87.664.793,00
18) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Toilet SLBN Bintan Utara sebesar Rp8.881.465,00
19) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Toilet SLBN 2 Bintan Kijang sebesar Rp17.818.796,70
20) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Berat Toilet SLBN Batam sebesar Rp8.370.865,00

21) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Berat Toilet SLBN Bintan Kijang sebesar Rp8.370.865,20
22) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Berat Toilet SLBN 1 Tanjungpinang sebesar Rp8.370.865,00
23) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ringan Toilet SLBN Batam sebesar Rp13.910.864,00
24) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Berat Toilet SLBN Natuna sebesar Rp8.370.865,10
25) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Mushola SLBN Karimun (Lanjutan) sebesar Rp15.150.390,00
26) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Semenisasi Lapangan Olahraga SMAN 1 Batam sebesar Rp14.931.720,00
27) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan USB SMA di Rempang Galang Kota Batam sebesar Rp96.681.000,00
28) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 29 Batam sebesar Rp45.093.750,00
29) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 1 Bintan Utara sebesar Rp45.121.500,00
30) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan *Paving Block* Halaman SMAN 1 Bunguran Timur Laut sebesar Rp14.931.720,00
31) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Mushola SMAN 17 Batam sebesar Rp14.931.720,00
32) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 25 Batam sebesar Rp45.043.800,00
33) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 26 Batam sebesar Rp45.010.500,00
34) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 5 Batam sebesar Rp45.093.750,00
35) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Mushola SMAN 7 Tanjungpinang sebesar Rp9.755.100,00
36) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Toilet SMAN 1 Tanjungpinang sebesar Rp9.801.300,00
37) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Lapangan Olahraga SMAN 7 Tanjungpinang sebesar Rp19.713.600,00
38) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Semenisasi Lapangan SMAN 1 Karimun sebesar Rp14.829.600,00
39) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pemasangan Keramik SMAN 1 Karimun sebesar Rp14.829.600,00

40) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pemasangan Keramik SMAN 5 Tanjungpinang sebesar Rp9.768.750,00
41) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Mushola SMAN 1 Ungar, Kab. Karimun sebesar Rp13.968.240,00
42) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 4 Batam sebesar Rp9.863.016,00
43) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Toilet, Semenisasi dan Pemasangan Awning SMKN 5 Batam sebesar Rp24.827.946,00
44) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pemasangan *Paving Block* SMKN 2 Karimun sebesar Rp5.928.000,00
45) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Toilet SMKN 6 Batam (ASTACITA) sebesar Rp3.957.150,00
46) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Batu Miring SMKN 1 Karimun sebesar Rp5.786.541,00
47) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling (BK), Ruang Praktik Siswa (RPS) Animasi, DKV, Laboratorium Kimia Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Lanjutan Pembangunan Laboratorium Fisika dan Pembangunan UKS SMKN 9 Batam sebesar Rp93.323.250,00
48) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Semenisasi SMKN 11 Batam sebesar Rp7.844.370,00
49) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru, Laboratorium Kimia, Laboratorium Fisika dan Laboratorium Komputer SMKN 1 Bintan Utara sebesar Rp39.833.460,00
50) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah dan Tata Usaha SMK Negeri 1 Lingga sebesar Rp4.484.400,00
51) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kepala Sekolah dan Tata Usaha SMK Negeri 2 Lingga sebesar Rp8.979.900,00
52) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Mushola dan Pemasangan *Paving Block* Lapangan SMKN 10 Batam sebesar Rp13.873.800,00
53) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Toilet SMKN 7 Batam (ASTACITA) sebesar Rp7.914.300,00
54) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Toilet SMKN 4 Tanjungpinang (ASTACITA) sebesar Rp3.999.774,00

55) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Batu Miring, Penimbunan dan Pemasangan *Paving Block* Halaman SMKN 1 Bunguran Timur Laut sebesar Rp10.878.777,00
56) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Semenisasi Lapangan Olahraga SMAN 1 Batam sebesar Rp9.867.900,00
57) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan *Paving Block* Halaman SMAN 1 Bunguran Timur Laut sebesar Rp9.894.540,00
58) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Lanjutan Pembangunan Mushola SMAN 17 Batam sebesar Rp9.910.080,00
59) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Lanjutan Pembangunan Mushola SMAN 7 Tanjungpinang sebesar Rp7.958.700,00
60) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Toilet SMAN 1 Tanjungpinang sebesar Rp7.925.400,00
61) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Semenisasi Lapangan dan Pemasangan Keramik SMAN 1 Karimun sebesar Rp19.735.800,00
62) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pemasangan Keramik SMAN 5 Tanjungpinang sebesar Rp7.858.800,00
63) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Mushola SMAN 1 Ungar, Kab. Karimun sebesar Rp9.867.900,00
64) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Kantor Dinas Pendidikan sebesar Rp6.916.210,00
65) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Lanjutan Pemeliharaan Kantor Dinas Pendidikan sebesar Rp4.485.132,00
66) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan sebesar Rp4.951.510,00
67) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pemasangan Keramik Cabdin Lingga Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Pendidikan sebesar Rp3.469.660,00

h. Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp601.882.133,27 yang berasal dari Utang Belanja (Tunda Bayar 2025) antara lain:
1) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 20 Batam sebesar Rp22.870.440,00
2) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang SLBN Kundur sebesar Rp13.968.240,00
3) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Perencanaan Penataan Ruang SMAN 1 Karimun sebesar Rp90.576.000,00

4) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Olahraga SMAN 7 Tanjungpinang sebesar Rp14.674.200,00
5) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 1 Bintan Utara sebesar Rp27.328.200,00
6) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan *Drainase*, Toilet SMKN 10 Batam dan Toilet SMKN 11 Batam (ASTACITA) sebesar Rp11.932.563,27
7) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Berat Toilet SLBN 1 Tanjungpinang, Toilet SLBN Natuna, Toilet SLBN Kijang, Toilet SLBN Batam sebesar Rp39.927.377,00
8) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Toilet SLBN 2 Kijang dan Toilet SLBN Bintan Utara sebesar Rp21.924.331,00
9) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 10 Batam sebesar Rp12.920.400,00
10) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 5 Batam sebesar Rp28.504.800,00
11) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 25 Batam sebesar Rp28.504.800,00
12) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 26 Batam sebesar Rp28.504.800,00
13) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 20 Batam sebesar Rp19.807.950,00
14) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan USB SMA di Rempang Galang Kota Batam sebesar Rp35.869.650,00
15) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 11 Batam sebesar Rp47.130.600,00
16) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Ruangan SLBN Kundur sebesar Rp11.588.400,00
17) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Mushola SLBN Karimun sebesar Rp10.722.600,00
18) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLBN 2 Batam sebesar Rp83.866.982,00

19) Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 10 Batam (ASTACITA) sebesar Rp51.259.800,00

4. Penambahan dari Utang Belanja (Tunda Bayar 2025) sebesar Rp9.272.601.642,02 antara lain:
   a. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp928.221.553,00 antara lain:
      1) Utang Belanja Pembangunan *Landscape* Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tunda bayar 2025) sebesar Rp379.424.553,00
      2) Utang Belanja pembangunan Interior dan Peningkatan Ruang Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tunda Bayar 2025) sebesar Rp399.747.000,00
      3) Utang Belanja pembangunan Sarana Pendukung Mushola dan parkir Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tunda Bayar 2025) sebesar Rp149.050.000,00
   b. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Kanopi) pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib (Tunda Bayar 2025) sebesar Rp195.360.000,00
   c. Dinas Perhubungan sebesar Rp2.173.893.981,23 antara lain:
      1) Utang Belanja Tahun 2025 (Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Permai Kampung Beko Pulau Kasu Kota Batam) sebesar Rp281.313.053,77
      2) Utang Belanja Tahun 2025 (Pekerjaan Pengadan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Jagoh kabupaten Lingga) sebesar Rp1.892.580.927,46
   d. Utang Belanja pada Dinas Pendidikan sebesar Rp5.975.126.107,79 antara lain:
      1) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 20 Batam sebesar Rp349.746.000,00
      2) Pekerjaan Pembangunan Mushola SLBN Karimun (Lanjutan) sebesar Rp158.099.545,00
      3) Pekerjaan Pembangunan Batu Miring SMKN 1 Karimun sebesar Rp186.923.693,00
      4) Lanjutan Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling (BK) SMKN 9 Batam sebesar Rp70.359.826,07
      5) Pekerjaan Pembangunan *Drainase* SMKN 10 Batam sebesar Rp33.219.369,99
      6) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 11 Batam (ASTACITA) sebesar Rp1.939.553.006,00
      7) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 10 Batam sebesar Rp1.183.442.873,00
      8) Pembangunan Ruang Kepala Sekolah dan Tata Usaha SMKN 2 Lingga sebesar Rp216.647.028,65

9) Pekerjaan Pembangunan Mushola SMKN 10 Batam sebesar Rp190.374.881,70
10) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 10 Batam sebesar Rp378.541.033,38
11) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Pemeliharaan Kantor Dinas Pendidikan–Sub.Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Pendidikan sebesar Rp199.314.408,00
12) Pemasangan Keramik Cabdin Lingga Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Pendidikan sebesar Rp43.473.660,00
13) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 29 Batam sebesar Rp325.524.124,00
14) Pembangunan Lapangan Olahraga SMAN 7 Tanjungpinang sebesar Rp163.325.556,00
15) Semenisasi Lapangan SMAN 1 Karimun sebesar Rp160.008.699,00
16) Pemasangan Keramik SMAN 1 Karimun sebesar Rp206.557.785,00
17) Rehabilitasi Mushola SMAN 1 Ungar, Kab. Karimun sebesar Rp170.014.619,00

5. Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Beban Pemeliharaan pekerjaan Rehabilitasi Berat Toilet SLBN Natuna pada Dinas Pendidikan sebesar Rp114.721.789,00
6. Penerimaan Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp44.854.357.248,83 antara lain:
   a. Hibah Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMK dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN Non BLUD) sebesar Rp5.584.301.775,00
   b. Hibah Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMA dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMAN) sebesar Rp27.708.534.171,83
   c. Hibah Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SLB dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) sebesar Rp690.183.302,00
   d. Koreksi kurang catat pengakuan pendapatan dan belanja yang bersumber dari program revitalisasi pendidikan dasar dan menengah dan bantuan pemerintah lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp10.871.338.000,00
7. Koreksi kurang catat kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan yang bersumber dari dana BLUD ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan SMKN 7 Batam pada Dinas Pendidikan sebesar Rp148.740.000,00
8. Koreksi kurang catat hibah CSR Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa hibah aset Ruang Kelas Baru (RKB) dari PT. Agung Automall berdasarkan BAST Nomor 0173/AT-BTC/XII/2025 Tanggal 28 Mei 2025 pada SMAN 26 Batam sebesar Rp284.160.822,00

B. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp591.486.480.372,04 berasal dari:

1. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.397.035.466,76 antara lain:
   a. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Jagoh kabupaten Lingga) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp2.825.721.858,76
   b. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp571.313.608,00 antara lain:
      1) Pekerjaan Pemasangan *Paving Block* SMKN 2 Karimun sebesar Rp201.259.444,00
      2) Pekerjaan Pemasangan *Paving Block* Lapangan SMKN 10 Batam sebesar Rp196.864.142,00
      3) Pembangunan *Paving Block* Halaman SMAN 1 Bunguran Timur Laut sebesar Rp173.190.022,00
2. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (Realisasi fisik Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Permai Kampung Beko Pulau Kasu Kota Batam 80%) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp978.264.356,53
3. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain akibat Usulan Pemusnahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp50.000.000,00
4. Reklasifikasi keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke dalam Beban Pemeliharaan pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp242.788.068,00 antara lain:
   a. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke dalam Beban Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Pendidikan sebesar Rp199.314.408,00
   b. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke dalam Beban Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Pendidikan cabang Dinas Lingga sebesar Rp43.473.660,00
5. Mutasi Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan antar OPD sebesar Rp570.041.252.566,45 antara lain:
   a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp553.077.679.590,77 antara lain:
      1) Mutasi BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Sekretariat DPRD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 sebesar Rp81.935.353.456,93
      2) Mutasi BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 sebesar Rp361.260.432.554,01

3) Mutasi BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 sebesar Rp98.353.477.446,69
4) Mutasi BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 sebesar Rp485.305.980,00
5) Mutasi BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Dinas Pendidikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 sebesar Rp1.282.942.659,49
6) Mutasi BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 sebesar Rp199.950.000,00
7) Mutasi BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 sebesar Rp9.560.217.493,65

b. Mutasi BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Masjid Raya Nur Ilahi Dompak) ke Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah berdasarkan BAST Nomor B/17/BAST/PUPP.1/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp8.085.242.999,68
c. Dinas Kesehatan sebesar Rp8.878.329.976,00 antara lain:
    1) Mutasi BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud berdasarkan BAST Nomor 1858/BA-HB/PERLK/XI/2025 Tanggal 20 November 2025 sebesar Rp7.166.475.976,00
    2) Mutasi BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib berdasarkan BAST Nomor 1885/BA-HB/PERLK/XI/2025 Tanggal 24 November 2025 sebesar Rp1.711.854.000,00

6. Pelunasan Utang Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp6.638.115.345,24 antara lain:
    a. Pelunasan Utang Pengadaaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp198.225.143,28
    b. Pelunasan Utang Pengadaaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp219.280.700,00
    c. Pelunasan Utang Pengadaaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp199.866.000,00
    d. Pelunasan Utang Pengadaaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp242.638.990,00

e. Pelunasan Utang Pengadaaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.900.641.377,29
f. Pelunasan Utang Pengadaaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.877.463.134,67

7. Penghapusan BMD Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.153.454.625,37 antara lain:
   a. Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 945 Tahun 2025, Tanggal 26 Agustus 2025 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp8.519.819.025,37
   b. Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Hibah ke Pemerintah Kabupaten Lingga berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 691 Tahun 2025 Tanggal 10 Juni 2025 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp265.000.000,00
   c. Penghapusan Aset Tetap Gedung Dan Bangunan karena Hibah ke Pemerintah Kabupaten Lingga berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 691 Tahun 2025 Tanggal 10 Juni 2025 pada Dinas Pariwisata sebesar Rp368.635.600,00
8. Koreksi terkait temuan BPK atas Kelebihan Pembayaran Belanja Modal dan Potensi Kelebihan Pembayaran sebesar Rp985.132.943,69 antara lain:
   a. Koreksi kelebihan pembayaran atas Belanja Modal pekerjaan Bangunan Gedung Kantor (Labkesmas) pada Dinas Kesehatan sebesar Rp100.156.096,37
   b. Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp381.775.097,58 antara lain:
      1) Koreksi potensi kelebihan pembayaran atas Tunda Bayar Pekerjaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan pada Dinas Pendidikan (SMA N 29 Batam) sebesar Rp29.930.582,14
      2) Koreksi potensi kelebihan pembayaran atas Tunda Bayar Pekerjaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan pada Dinas Pendidikan (SMK N 10 Batam) sebesar Rp44.888.327,86
      3) Koreksi potensi kelebihan pembayaran atas Tunda Bayar Pekerjaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan pada Dinas Pendidikan (SMK N 11 Batam) sebesar Rp30.085.638,99
      4) Koreksi kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pada Dinas Pendidikan (SMA N 25 Batam) sebesar Rp87.918.830,70
      5) Koreksi kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan pada Dinas Pendidikan (SMA N 26 Batam) sebesar Rp39.187.717,49
      6) Koreksi kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Pembangunan USB SMA di Rempang Galang Batam) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp35.402.408,93
      7) Koreksi kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Lanjutan Pembangunan USB di SLB N 2 Batam) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp17.339.591,47

8) Koreksi atas kelebihan pembayaran pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp97.022.000,0

c. Koreksi kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pembangunan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Lanjutan) sebesar Rp492.201.633,72

d. Koreksi kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp11.000.116,02

9. Koreksi lebih catat pengakuan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan Berita Acara Adendum Nomor 6946/C5/KU.07.00/2025 sebesar Rp437.000,00 atas hibah bantuan pemerintah Program Revitalisasi SMA dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMAN) pada SMAN 1 Singkep Dinas Pendidikan

C. Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 Rp2.997.282.508.161,98

Adapun rincian mutasi aset tetap gedung dan bangunan per OPD dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.5.199 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Pendidikan	1.153.264.923.498,53	22.250.466.178,01	54.700.558.122,38	5.073.776.908,25	1.225.142.170.890,67
Dinas Kesehatan	22.637.440.001,52	17.901.215.230,00	659.992.271,00	9.221.125.062,37	31.977.522.440,15
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	270.696.151.212,56	0,00	1.907.214.000,00	0,00	272.603.365.212,56
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	46.978.521.960,00	32.941.640.000,00	8.231.455.248,00	492.201.633,72	87.659.415.574,28
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	77.059.503.303,36	498.394.000,00	361.310.226.554,01	8.285.108.999,68	430.583.014.857,69
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	569.486.639.076,04	418.939.700,00	1.097.857.553,00	553.296.960.290,77	17.706.476.038,27
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	89.965.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	109.865.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	5.287.098.342,30	0,00	0,00	0,00	5.287.098.342,30
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.528.209.223,48	0,00	0,00	0,00	2.528.209.223,48
Dinas Sosial	5.116.692.359,00	0,00	199.950.000,00	0,00	5.316.642.359,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.002.648.000,00	0,00	485.305.980,00	0,00	2.487.953.980,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	624.390.200,00	3.330.159.000,00	240.155.794,00	61.000.116,02	4.133.704.877,98

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	35.183.812.314,51	0,00	0,00	0,00	35.183.812.314,51
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.267.797.894,00	0,00	0,00	0,00	3.267.797.894,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	354.092.597.345,67	3.241.022.142,77	2.463.605.449,81	14.224.446.617,95	345.572.778.320,30
Dinas Komunikasi dan Informatika	736.923.281,00	0,00	0,00	0,00	736.923.281,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	49.615.984,00	0,00	0,00	0,00	49.615.984,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	78.416.217,00	0,00	0,00	0,00	78.416.217,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	56.658.605.492,23	0,00	0,00	0,00	56.658.605.492,23
Dinas Kebudayaan	60.702.799.231,30	0,00	0,00	0,00	60.702.799.231,30
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.609.362.017,00	0,00	0,00	0,00	12.609.362.017,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	49.696.957.148,94	0,00	0,00	0,00	49.696.957.148,94
Dinas Pariwisata	5.004.000.801,00	0,00	0,00	368.635.600,00	4.635.365.201,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.557.666.297,10	198.225.143,28	0,00	198.225.143,28	8.557.666.297,10
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	137.400.000,00	0,00	0,00	0,00	137.400.000,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	373.623.000,00	0,00	0,00	0,00	373.623.000,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	8.188.125.164,00	0,00	106.438.720.446,37	0,00	114.626.845.610,37
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2.510.453.750,00	0,00	0,00	0,00	2.510.453.750,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	2.121.021.650,00	0,00	0,00	0,00	2.121.021.650,00
Biro Umum	10.743.149.796,63	0,00	0,00	0,00	10.743.149.796,63
Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	45.463.347.933,71	0,00	0,00	265.000.000,00	45.198.347.933,71
Badan Pendapatan Daerah	41.738.650.488,00	0,00	9.560.217.493,65	0,00	51.298.867.981,65
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	5.321.872.144,93	0,00	81.935.353.456,93	0,00	87.257.225.601,86
Badan Penghubung Daerah	19.730.034.643,00	0,00	0,00	0,00	19.730.034.643,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**2.878.738.414.770,81**	**80.799.961.394,06**	**629.230.612.369,15**	**591.486.480.372,04**	**2.997.282.508.161,98**

Untuk masa manfaat aset tetap gedung dan bangunan ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.5.200 Masa Manfaat Aset Tetap Gedung dan Bangunan

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	3			**Gedung dan Bangunan**	
1	3	3	01		Bangunan Gedung	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02		Monumen	
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	03		Bangunan Menara	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 7.5.201 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
		546.490.257.919,51	**59.890.476.149,22**	**146.088.263.461,02**	**145.626.326.387,29**	**606.842.671.142,46**
1	Dinas Pendidikan	192.469.626.989,74	23.138.524.733,83	2.182.713.173,60	0,00	217.790.864.897,17
2	Dinas Kesehatan	3.860.239.631,00	305.703.204,28	0,00	2.740.972.432,86	1.424.970.402,42
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	58.634.664.573,55	5.454.633.334,36	379.460.970,00	0,00	64.468.758.877,91
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	8.448.113.110,49	1.071.082.722,80	2.361.511.462,86	0,00	11.880.707.296,15
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	3.269.396.295,85	8.626.033.882,92	92.764.405.535,01	450.913.156,67	104.208.922.557,11
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	143.857.580.758,56	331.672.777,29	0,00	140.412.519.517,72	3.776.734.018,13
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.942.242,00	2.197.300,00	0,00	0,00	22.139.542,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	822.006.310,00	104.007.143,00	0,00	0,00	926.013.453,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	640.995.436,00	50.698.241,00	0,00	0,00	691.693.677,00
10	Dinas Sosial	871.567.774,67	106.332.847,18	36.990.750,00	0,00	1.014.891.371,85
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	505.865.361,00	49.759.079,60	176.327.839,40	0,00	731.952.280,00

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	112.825.392,00	18.701.801,61	0,00	18.083.333,00	113.443.860,61
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	5.982.970.564,18	715.164.663,54	0,00	0,00	6.698.135.227,72
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	936.589.188,96	65.482.535,19	0,00	0,00	1.002.071.724,15
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perhubungan	56.184.592.008,45	9.112.870.936,70	0,00	1.699.654.815,49	63.597.808.129,66
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	155.105.077,81	14.738.466,04	0,00	0,00	169.843.543,85
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.059.653,00	992.320,00	0,00	0,00	4.051.973,00
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	7.972.314,00	1.568.324,00	0,00	0,00	9.540.638,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.787.375.800,29	1.135.708.269,58	0,00	38.538,00	6.923.045.531,87
21	Dinas Kebudayaan	8.187.109.520,86	1.214.055.984,57	0,00	0,00	9.401.165.505,43
22	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	2.508.213.118,00	252.187.240,00	0,00	0,00	2.760.400.358,00
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.777.748.536,33	997.742.565,44	0,00	122.287.954,54	7.653.203.147,23
24	Dinas Pariwisata	1.260.085.165,00	97.835.748,00	0,00	86.014.973,00	1.271.905.940,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.900.754.128,09	181.331.035,79	0,00	0,00	2.082.085.163,88
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	46.295.500,00	2.748.000,00	0,00	0,00	49.043.500,00
27	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	116.493.771,00	7.472.460,00	0,00	0,00	123.966.231,00
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	2.114.754.619,00	2.292.536.912,50	28.725.301.730,14	0,00	33.132.593.261,64
29	Biro Pengadaan Barang/Jasa	375.910.344,00	50.593.227,00	0,00	0,00	426.503.571,00
30	Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Biro Administrasi Pimpinan	717.363.019,00	42.420.433,00	0,00	0,00	759.783.452,00
33	Biro Umum	2.772.581.994,00	214.862.995,00	0,00	0,00	2.987.444.989,00
34	Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	22.367.230.453,00	971.206.629,00	0,00	95.841.666,01	23.242.595.415,99
37	Badan Pendapatan Daerah	11.695.395.295,00	1.020.268.032,40	1.584.614.399,25	0,00	14.300.277.726,65
38	Badan Kepegawaian dan Korpri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
41	Sekretariat DPRD	915.567.301,50	1.844.741.610,70	17.876.937.600,76	0,00	20.637.246.512,96
42	Badan Penghubung Daerah	2.164.266.673,18	394.600.692,90	0,00	0,00	2.558.867.366,08
43	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	4.112.540.134.981,23	**4.011.564.533.138,15**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Komponen biaya perolehan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai. Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dapat dikapitalisasi berupa:

a) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu Nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
b) Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 1 Januari 2025 sebesar Rp4.011.564.533.138,15. Mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 7.5.202 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2025

ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN				
I	**Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, 1 Januari 2025**			**4.011.564.533.138,15**
II	**Penambahan :**			
	1	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025	46.310.371.998,10	
	2	Mutasi Masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Antar OPD	275.461.302.614,68	

ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN				
	3	Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	3.397.035.466,76	
	4	Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Aset Lain-lain BLUD	28.023.000,00	
	5	Kapitalisasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan	1.120.074.769,10	
	6	Penerimaan Hibah Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya	51.060.013.986,52	
	7	Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Utang Belanja (Tunda Bayar) TA 2025	14.090.979.662,96	
	8	Koreksi Terkait Kurang Catat Kapitalisasi Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.964.199.980,00	
		Total Penambahan :		**394.432.001.478,12**
III	**Pengurangan :**			
	1	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	24.896.129,00	
	2	Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Beban Pemeliharaan	4.751.115.600,00	
	3	Pelunasan Utang Belanja (Tunda Bayar) TA 2024	6.752.838.308,21	
	4	Mutasi Keluar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Antar OPD	275.461.302.614,68	
	5	Penghapusan BMD Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	6.227.189.226,00	
	6	Koreksi terkait Temuan BPK atas Kelebihan Pembayaran Belanja Modal dan Potensi Kelebihan Pembayaran	239.057.757,15	
		Total Pengurangan		**293.456.399.635,04**
IV	**Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, 31 Desember 2025**			**4.112.540.134.981,23**

Dari tabel mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan sebesar Rp394.432.001.478,12 berasal dari:
   1. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 sebesar Rp46.310.371.998,10
      a. Dinas Kesehatan sebesar Rp668.500.000,00
      b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp21.253.839.969,89
      c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp8.530.350,00
      d. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp18.216.461.678,21
      e. Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp6.163.040.000,00
   2. Mutasi Masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Antar OPD sebesar Rp275.461.302.614,68 antara lain:
      a. Mutasi Masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan BAST Nomor 119/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 08 September 2025 dan Keputusan Gubernur

Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp1.007.781.000,00

b. Mutasi Masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan BAST Nomor 103/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 08 September 2025 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 pada Biro Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp39.950.000,00

c. Mutasi Masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan BAST Nomor 109/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 08 September 2025 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp272.742.842.414,68

d. Mutasi Masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan BAST Nomor 107/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 08 September 2025 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp401.958.200,00

e. Mutasi Masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan BAST Nomor 104/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 08 September 2025 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.268.771.000,00

3. Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.397.035.466,76 antara lain:
   a. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Jagoh kabupaten Lingga pada Dinas Perhubungan sebesar Rp2.825.721.858,76
   b. Dinas Pendidikan sebesar Rp571.313.608,00 antara lain:
      1) Pekerjaan Pemasangan *Paving Block* SMKN 2 Karimun sebesar Rp201.259.444,00
      2) Pekerjaan Pemasangan *Paving Block* Lapangan SMKN 10 Batam sebesar Rp196.864.142,00
      3) Pembangunan *Paving Block* Halaman SMAN 1 Bunguran Timur Laut sebesar Rp173.190.022,00
4. Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Aset Lain-lain BLUD pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp28.023.000,00
5. Kapitalisasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan sebesar Rp1.120.074.769,10 antara lain:
   a. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp739.275.691,00 berasal dari:

1) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kabupaten Karimun Kapitalisasi 2018 Jalan Propinsi Kolektor sebesar Rp49.679.000,00
2) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Pembangunan Jalan Akses Menuju Makogabwilhan Pulau Dompak (Lanjutan) Kapitalisasi 2023 Jalan Propinsi Kolektor sebesar Rp99.563.000,00
3) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Pekerjaan Bronjong disamping Dompak sebesar Rp79.493.750,00
4) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab Karimun Kapitalisasi 2018 Jalan Propinsi Kolektor sebesar Rp99.689.100,00
5) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Pembangunan Jalan Akses Menuju Makogabwilhan Pulau Dompak (Lanjutan) Kapitalisasi 2023 Jalan Propinsi Kolektor sebesar Rp75.996.670,00
6) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Batu 14 Pel. Tg Berlian, Kab Karimun (DBH Sawit Provinsi Kepri Lanjutan) Kapitalisasi Jalan Propinsi Bernilai Strategis Propinsi 2023 sebesar Rp74.652.900,00
7) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Pembangunan Jembatan Semala, Kab Natuna Kapitalisasi 2023 Jembatan pada Jalan Propinsi Bernilai Strategis Propinsi sebesar Rp195.666.271,00
8) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Sukaramai RW 5 Kel Pinang Kencana sebesar Rp14.935.000,00
9) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Pekerjaan Bronjong disamping Dompak sebesar Rp49.600.000,00

b. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (Tunda Bayar 2025) sebesar Rp380.799.078,10
   1) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Tunda Bayar 2025) Pengaman Sungai Paket Pembangunan Tembok Penahan Tebing/Pemecah Ombak Pantai Desa Pengadah Kec Bunguran Timur Laut Kab Natuna sebesar Rp18.469.763,53
   2) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Tunda Bayar 2025) Pembangunan Batu

Miring Sungai Parit Jepun Jl.Muharal Kebun Pinang RT 02 RW 03 Kel Gading Sari Kec Kundur Kab Karimun sebesar Rp17.610.416,40

3) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Tunda Bayar 2025) Pengaman Sungai Paket Pembangunan Batu Miring Sungai Desa Ceruk Kec Bunguran Timur Laut Kab Natuna sebesar Rp35.054.096,77
4) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Tunda Bayar 2025) Peningkatan Jalan Sp. Budus - Roro Penarik, Kab. Lingga sebesar Rp99.687.100,00
5) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Tunda Bayar 2025) Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang sebesar Rp99.789.000,00
6) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Tunda Bayar 2025) Pembangunan Jembatan Semala, Kab Natuna Kapitalisasi 2023 Jembatan pada Jalan Propinsi Bernilai Strategis Propinsi sebesar Rp49.157.993,00
7) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Tunda Bayar 2025) Pengaman Sungai Paket Pembangunan Batu Miring Sungai Silas, Belakang Kantor Desa Kelanga, Kec Bunguran Timur Laut Kab Natuna sebesar Rp29.947.800,00
8) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Tunda Bayar 2025) Pengaman Sungai Paket Pembangunan Tembok Penahan Tebing/Pemecah Ombak Pantai Desa Pengadah Kec Bunguran Timur Laut Kab Natuna sebesar Rp15.895.200,00
9) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (Tunda Bayar 2025) Pembangunan Batu Miring Sungai Parit Jepun Jl.Muharal Kebun Pinang RT 02 RW 03 Kel Gading Sari Kec Kundur Kab Karimun sebesar Rp15.187.708,40

6. Penerimaan Hibah Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya sebesar Rp51.060.013.986,52, antara lain:
   a. Penerimaan Hibah dari Kementerian ESDM berupa PLTS Atap berdasarkan BAST Nomor 01/BAST.HIBAH-PLTS ATAP/XII/2025 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp1.849.834.665,00
   b. Penerimaan Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum - BPJN Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 111.b/BAST/Bb24/2025 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp48.284.180.693,00
   c. Penerimaan Hibah Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMA dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMAN) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp925.998.628,52

7. Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Utang Belanja (Tunda Bayar) TA 2025 sebesar Rp14.090.979.662,96 antara lain:
    a. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp7.152.649.800,00
        1) Utang Belanja Modal Tahun 2025 Pembayaran Pengadaan dan Pemasangan PJU PLTS di Kota Tanjungpinang sebesar Rp270.396.000,00
        2) Utang Belanja Modal Tahun 2025 Pembayaran Pengadaan PJU PLTS di Kota Batam sebesar Rp5.218.642.800,00
        3) Utang Belanja Modal Tahun 2025 Pembayaran Pengadaan dan Pemasangan PJU PLTS di Kabupaten Karimun sebesar Rp459.816.000,00
        4) Utang Belanja Modal Tahun 2025 Pembayaran Pengadaan PJU PLTS di Kabupaten Bintan sebesar Rp1.203.795.000,00
    b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp6.747.853.862,96 antara lain:
        1) Utang Belanja Modal Tahun 2025 Peningkatan Jalan Sp. Budus - Roro Penarik, Kab. Lingga sebesar Rp1.073.336.230,00
        2) Utang Belanja Modal Tahun 2025 Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang sebesar Rp662.514.630,00
        3) Utang Belanja Modal Tahun 2025 Pembangunan Jembatan Semala, Kab Natuna Kapitalisasi 2023 Jembatan Pada Jalan Propinsi Bernilai Strategis Propinsi sebesar Rp3.228.307.256,31
        4) Utang Belanja Modal Tahun 2025 Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kawasan LANUDAL Tanjungpinang sebesar Rp940.926.446,80
        5) Utang Belanja Modal Tahun 2025 Pembangunan Batu Miring Sungai Silas,Belakang Kantor Desa Kelanga,Kec Bunguran Timur Laut Kab Natuna sebesar Rp174.587.968,33
        6) Utang Belanja Modal Tahun 2025 Bangunan Pengaman Sungai Paket Pembangunan Tembok Penahan Tebing/Pemecah Ombak Pantai Desa Pengadah Kec Bunguran Timur Laut Kab Natuna sebesar Rp209.079.131,53
        7) Utang Belanja Modal Tahun 2025 Pembangunan Batu Miring Sungai Parit Jepun Jl.Muharal Kebun Pinang RT 02 RW 03 Kel Gading Sari Kec Kundur Kab Karimun pada sebesar Rp259.690.819,43
        8) Utang Belanja Modal Tahun 2025 Paket Pembangunan Batu Miring Sungai Desa Ceruk Kec Bunguran Timur Laut Kab Natuna sebesar Rp199.411.380,56
    c. Utang Belanja Modal Tahun 2025 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Arsitektur pada Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan Pelabuhan Kuala Riau Tanjungpinang pada Dinas Perhubungan Rp190.476.000,00
8. Koreksi terkait kurang catat Kapitalisasi dari Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi ke Aset tetap-Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Paket Pekerjaan

Penataan Taman Gurindam 12 kedalam Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp2.964.199.980,00

B. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp293.456.399.635,04 berasal dari :

1. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Pengadaan Rangka Besi Baliho/Spanduk) ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp24.896.129,00
2. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Beban Pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp4.751.115.600,00 antara lain:
   a. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Beban Pemeliharaan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang. Jembatan Pada Jalan Propinsi Bernilai Strategis Propinsi sebesar Rp3.406.934.600,00
   b. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Beban Pemeliharaan Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kawasan LANUDAL Tanjungpinang sebesar Rp1.344.181.000,00
3. Pelunasan Utang Belanja (Tunda Bayar) Tahun 2024 sebesar Rp6.752.838.308,21 antara lain:
   a. Pelunasan Utang Belanja Modal Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2024 sebesar Rp5.831.451.278,21
   b. Pelunasan Utang Belanja Modal Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan TA 2024 sebesar Rp921.387.030,00
4. Mutasi Keluar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Antar OPD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 Tanggal 16 September 2025 sebesar Rp275.461.302.614,68 antara lain:
   a. Mutasi BMD Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Sekretariat DPRD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 sebesar Rp1.007.781.000,00
   b. Mutasi BMD Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 sebesar Rp272.742.842.414,68
   c. Mutasi BMD Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 sebesar Rp39.950.000,00
   d. Mutasi BMD Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Dinas Pendidikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 sebesar Rp1.268.771.000,00

e. Mutasi BMD Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 sebesar Rp401.958.200,00

5. Penghapusan BMD Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp6.227.189.226,00 antara lain:
   a. Penghapusan BMD Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1105 Tahun 2025, Tanggal 14 Oktober 2025 sebesar Rp2.573.917.226,00
   b. Penghapusan BMD Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan SK Penghapusan Nomor 945 Tahun 2025, Tanggal 26 Agustus 2025 sebesar Rp3.653.272.000,00
6. Koreksi terkait Temuan BPK atas Kelebihan Pembayaran Belanja Modal dan Potensi Kelebihan Pembayaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp239.057.757,15 antara lain:
   a. Koreksi kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp49.093.502,55 dan tunda bayar 2025 sebesar Rp2.300.000,00
   b. Koreksi kelebihan pembayaran atas pekerjaan Penataan Taman Gurindam 12 kedalam Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp187.664.254,60

C. Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.112.540.134.981,23

Adapun rincian mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.5.203 Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Pendidikan	14.565.741.960,00	0,00	2.766.083.236,52	0,00	17.331.825.196,52
Dinas Kesehatan	1.021.326.000,01	668.500.000,00	0,00	0,00	1.689.826.000,01
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	12.279.215.917,36	0,00	0,00	0,00	12.279.215.917,36
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	6.722.035.500,00	6.163.040.000,00	28.023.000,00	0,00	12.913.098.500,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.880.857.753.026,54	21.253.839.969,89	331.859.151.719,74	5.936.456.516,15	3.228.034.288.200,02
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	285.798.779.445,68	0,00	0,00	275.461.302.614,68	10.337.476.831,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.996.000,00	0,00	0,00	0,00	9.996.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	208.622.000,00	0,00	0,00	0,00	208.622.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	516.959.431,07	0,00	0,00	0,00	516.959.431,07

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Sosial	20.185.000,00	0,00	0,00	0,00	20.185.000,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	600.927.000,00	0,00	0,00	0,00	600.927.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	429.594.968,00	0,00	0,00	0,00	429.594.968,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	25.196.931.434,36	0,00	0,00	0,00	25.196.931.434,36
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	99.880.000,00	0,00	0,00	0,00	99.880.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Dinas Perhubungan	285.969.429.494,55	0,00	3.016.197.858,76	6.227.189.226,00	282.758.438.127,31
Dinas Komunikasi dan Informatika	7.453.564.535,00	0,00	0,00	0,00	7.453.564.535,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	108.334.000,00	0,00	0,00	0,00	108.334.000,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	34.007.500,00	8.530.350,00	0,00	0,00	42.537.850,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.242.622.986,00	0,00	0,00	0,00	1.242.622.986,00
Dinas Kebudayaan	866.460.646,00	0,00	0,00	0,00	866.460.646,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	790.008.400,00	0,00	0,00	0,00	790.008.400,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	9.453.128.807,57	0,00	0,00	0,00	9.453.128.807,57
Dinas Pariwisata	5.351.707.445,00	0,00	0,00	0,00	5.351.707.445,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	280.346.053.361,30	18.216.461.678,21	9.002.484.465,00	5.831.451.278,21	301.733.548.226,30
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.283.800,00	0,00	0,00	0,00	12.283.800,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	39.950.000,00	0,00	39.950.000,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	965.050.893,69	0,00	0,00	0,00	965.050.893,69
Biro Perekonomian dan Pembangunan	7.630.000,00	0,00	0,00	0,00	7.630.000,00
Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Umum	16.957.200.066,00	0,00	0,00	0,00	16.957.200.066,00
Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	171.687.192.620,02	0,00	0,00	0,00	171.687.192.620,02
Badan Pendapatan Daerah	1.358.823.900,00	0,00	401.958.200,00	0,00	1.760.782.100,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	19.825.000,00	0,00	0,00	0,00	19.825.000,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	44.858.000,00	0,00	0,00	0,00	44.858.000,00
Sekretariat DPRD	556.989.000,00	0,00	1.007.781.000,00	0,00	1.564.770.000,00
Badan Penghubung Daerah	8.415.000,00	0,00	0,00	0,00	8.415.000,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**4.011.564.533.138,15**	**46.310.371.998,10**	**348.121.629.480,02**	**293.456.399.635,04**	**4.112.540.134.981,23**

Untuk masa manfaat aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.5.204 Masa Manfaat Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	4			**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	
1	3	4	1		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	1	1	Jalan	10
1	3	4	1	2	Jembatan	50
1	3	4	2		Bangunan Air	
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	2	2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	2	3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	3		Instalasi	
1	3	4	3	1	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	3	10	Instalasi Lain	20
1	3	4	4		Jaringan	
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	40
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	20

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT
						(TAHUN)
1	3	4	4	4	Jaringan Gas	30

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 7.5.205 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
		2.343.210.675.604,35	**164.997.274.151,40**	**223.734.221.717,27**	**226.328.813.457,31**	**2.505.613.358.015,71**
1	Dinas Pendidikan	6.505.723.020,38	1.135.907.978,81	205.192.651,04	0,00	7.846.823.650,23
2	Dinas Kesehatan	447.835.151,44	33.136.300,12	0,00	0,00	480.971.451,56
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	5.241.443.466,93	329.295.843,58	0,00	0,00	5.570.739.310,51
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	1.658.207.099,00	341.543.345,56	0,00	0,00	1.999.750.444,56
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.624.922.011.128,03	143.809.264.131,04	220.546.476.285,09	6.224.791,67	1.989.271.526.752,49
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	226.040.454.254,84	103.422.770,67	2.053.095.320,23	220.707.408.721,92	7.489.563.623,82
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.692.168,00	333.200,00	0,00	0,00	6.025.368,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	77.110.050,00	5.746.666,00	0,00	0,00	82.856.716,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60.311.933,62	51.695.943,11	0,00	0,00	112.007.876,73
10	Dinas Sosial	5.592.927,00	504.625,00	0,00	0,00	6.097.552,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	278.248.411,00	13.154.641,00	0,00	0,00	291.403.052,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	196.624.822,00	36.892.996,00	0,00	0,00	233.517.818,00
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	16.776.199.093,53	1.505.218.351,12	0,00	0,00	18.281.417.444,65

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	43.697.500,00	2.497.000,00	0,00	0,00	46.194.500,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.275.000,00	75.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
16	Dinas Perhubungan	203.206.050.304,34	8.274.434.923,63	0,00	5.609.953.359,00	205.870.531.868,97
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.874.456.788,07	306.556.447,00	0,00	3.044.336,07	4.177.968.899,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	44.402.960,00	3.126.682,00	0,00	2,00	47.529.640,00
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12.687.907,00	1.016.054,92	0,00	0,00	13.703.961,92
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	235.183.220,80	120.399.586,60	0,00	0,00	355.582.807,40
21	Dinas Kebudayaan	610.434.985,51	83.648.091,14	0,00	0,00	694.083.076,65
22	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	321.688.427,00	34.579.479,67	3,04	0,00	356.267.909,71
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.622.421.392,46	268.979.695,04	15.579,39	15.579,39	3.891.401.087,50
24	Dinas Pariwisata	1.938.130.471,00	94.845.120,00	0,00	0,00	2.032.975.591,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	77.794.523.369,36	7.324.125.308,99	96.345.555,50	0,00	85.214.994.233,85
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.123.880,46	482.606,67	0,00	0,00	8.606.487,13
27	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	998.750,00	12.567.604,67	0,00	13.566.354,67
29	Biro Pengadaan Barang/Jasa	622.493.595,00	30.052.907,00	0,00	0,00	652.546.502,00
30	Biro Perekonomian dan Pembangunan	3.116.582,00	190.750,00	0,00	0,00	3.307.332,00
31	Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Biro Umum	7.503.633.636,00	593.958.372,11	0,00	0,00	8.097.592.008,11
34	Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	160.450.727.001,70	414.900.683,00	0,00	0,00	160.865.627.684,70

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
37	Badan Pendapatan Daerah	365.016.736,88	33.661.935,00	401.958.201,45	0,00	800.636.873,33
38	Badan Kepegawaian dan Korpri	5.327.969,00	495.624,96		0,68	5.823.593,28
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.709.767,00	1.121.450,00	0,00	0,00	13.831.217,00
41	Sekretariat DPRD	311.476.960,00	40.239.516,66	416.403.850,28	0,00	768.120.326,94
42	Badan Penghubung Daerah	7.643.625,00	771.375,00	2.166.666,58	2.166.666,58	8.415.000,00
43	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	301.651.608.245,70	**279.218.737.302,70**

Aset tetap lainnya mencakup buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian, serta hewan/ternak dan tumbuhan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah. Komponen Biaya Perolehan aset tetap lainnya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Pengeluaran untuk pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi. Pengeluaran untuk pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dapat dikapitalisasi berupa:

a) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
b) Pengeluaran yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMN/D.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo awal Aset Tetap Lainnya per 1 Januari 2025 sebesar Rp279.218.737.302,70. Mutasi aset tetap lainnya Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 7.5.206 Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025

ASET TETAP LAINNYA				
I	Saldo Awal Aset Tetap Lainnya, 1 Januari 2025			**279.218.737.302,70**
II	Penambahan :			
	1	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025	21.957.775.186,00	
	2	Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya atas mutasi antar OPD	70.092.274.942,00	
	3	Koreksi Kurang Catat Atas Aset Tetap Renovasi	1.167.094.500,00	
	4	Kapitalisasi Bahan Bangunan dan Konstruksi kedalam Aset Tetap Lainnya	58.340.000,00	
	5	Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Utang Belanja (Tunda Bayar 2025)	102.860.000,00	
	6	Hibah Aset Tetap Lainnya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya	60.000.000,00	
		Total Penambahan :		**93.438.344.628,00**
III	Pengurangan :			
	1	Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya antar OPD	70.092.274.942,00	
	2	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain	685.786.654,00	
	3	Pelunasan Utang Belanja Tahun Anggaran 2024	43.775.000,00	
	4	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	183.637.089,00	
		Total Pengurangan		**71.005.473.685,00**
IV	**Saldo Akhir ASET TETAP LAINNYA, 31 Desember 2025**			**301.651.608.245,70**

Dari tabel mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp93.438.344.628,00 berasal dari:
   1. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp21.957.775.186,00 antara lain:
      a. Dinas Pendidikan sebesar Rp21.671.847.651,00
      b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp4.995.000,00
      c. Dinas Kebudayaan sebesar Rp124.986.000,00
      d. Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan sebesar Rp155.946.535,00
   2. Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya antar OPD dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan BAST Nomor 109/BAST/DPKP-

PK/TL/2025 Tanggal 08 September 2025 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp70.092.274.942,00

3. Koreksi Kurang Catat atas Aset Tetap Renovasi (Rumah Kemasan dan Pasar Ikan di Moro Tahun 2014) yang dibangun diatas lahan Pemerintah Kabupaten Karimun pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.167.094.500,00
4. Kapitalisasi Bahan Bangunan dan Konstruksi kedalam Aset Tetap Lainnya (Aset Tetap Renovasi) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp58.340.000,00
5. Penambahan yang berasal dari Utang Belanja (Tunda Bayar Tahun 2025) pengadaan aset tetap lainnya berupa alat *Marching Band* SMA Negeri di Batam sebesar Rp102.860.000,00
6. Penerimaan Hibah Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMA dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMAN) sebesar Rp60.000.000,00

B. Pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp71.005.473.685,00 berasal dari:

1. Mutasi BMD Aset Tetap Lainnya (Aset Tetap Renovasi) ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan 109/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 08 September 2025 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp70.092.274.942,00
2. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain sebesar Rp685.786.654,00 diantaranya:
    a. Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp666.151.654,00 antara lain:
        1) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain atas usulan Pemusnahan Barang Milik Daerah karena Rusak Berat pada SMKN 1 TPI sebesar Rp303.885.560,00
        2) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain atas usulan Pemusnahan Barang Milik Daerah karena Rusak Berat pada SMKN 2 BTM sebesar Rp56.828.000,00
        3) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain atas usulan Pemusnahan Barang Milik Daerah karena Rusak Berat pada SMAN 6 TPI sebesar Rp305.438.094,00
    b. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain atas usulan Pemusnahan Barang Milik Daerah karena Rusak Berat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp19.635.000,00
3. Pelunasan Utang Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp43.775.000,00

4. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp183.637.089,00 antara lain:

   a. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari dana BOSP sebesar Rp80.777.089,00

   b. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian berupa *Marching Band* pada Dinas Pendidikan sebesar Rp102.860.000,00

C. Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025 senilai Rp301.651.608.245,70

Tabel 7.5.207 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (2 + 3 + 4 - 5)*
Dinas Pendidikan	150.262.001.373,79	21.671.847.651,00	162.860.000,00	893.563.743,00	171.203.145.281,79
Dinas Kesehatan	1.123.552.174,10	0,00	0,00	0,00	1.123.552.174,10
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	640.455.426,00	0,00	0,00	0,00	640.455.426,00
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	181.700.600,00	0,00	0,00	0,00	181.700.600,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	6.457.907.399,99	0,00	70.092.274.942,00	0,00	76.550.182.341,99
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	70.822.930.854,30	0,00	0,00	70.092.274.942,00	730.655.912,30
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	247.771.000,00	0,00	0,00	0,00	247.771.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	983.027.000,00	0,00	0,00	0,00	983.027.000,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	863.728.100,00	4.995.000,00	0,00	19.635.000,00	849.088.100,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	943.123.575,00	0,00	0,00	0,00	943.123.575,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	78.580.852,00	0,00	0,00	0,00	78.580.852,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	359.961.364,00	0,00	0,00	0,00	359.961.364,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	69.529.600,00	0,00	58.340.000,00	0,00	127.869.600,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	650.659.380,00	0,00	0,00	0,00	650.659.380,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (2 + 3 + 4 - 5)*
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	187.710.000,00	0,00	0,00	0,00	187.710.000,00
Dinas Kebudayaan	1.639.204.620,00	124.986.000,00	0,00	0,00	1.764.190.620,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25.006.128.274,52	155.946.535,00	0,00	0,00	25.162.074.809,52
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.554.386.800,00	0,00	1.167.094.500,00	0,00	2.721.481.300,00
Dinas Pariwisata	5.380.164.000,00	0,00	0,00	0,00	5.380.164.000,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12.870.000,00	0,00	0,00	0,00	12.870.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	710.772.860,00	0,00	0,00	0,00	710.772.860,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	106.480.000,00	0,00	0,00	0,00	106.480.000,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Organisasi	45.380.000,00	0,00	0,00	0,00	45.380.000,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Umum	7.498.933.579,00	0,00	0,00	0,00	7.498.933.579,00
Biro Hukum	248.491.270,00	0,00	0,00	0,00	248.491.270,00
Inspektorat Daerah	236.708.000,00	0,00	0,00	0,00	236.708.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	256.584.900,00	0,00	0,00	0,00	256.584.900,00
Badan Pendapatan Daerah	75.639.000,00	0,00	0,00	0,00	75.639.000,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	71.697.600,00	0,00	0,00	0,00	71.697.600,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00
Sekretariat DPRD	1.473.896.900,00	0,00	0,00	0,00	1.473.896.900,00
Badan Penghubung Daerah	982.660.800,00	0,00	0,00	0,00	982.660.800,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**279.218.737.302,70**	**21.957.775.186,00**	**71.480.569.442,00**	**71.005.473.685,00**	**301.651.608.245,70**

Masa manfaat aset tetap lainnya ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.5.208 Masa Manfaat Aset Tetap Lainnya

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	**3**	**5**			**Aset Tetap Lainnya**	
1	3	5	7	1	Aset tetap dalam renovasi	50

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 7.5.209 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
		17.792.368.600,90	**1.960.782.022,25**	**15.250.034.618,80**	**13.297.296.301,73**	**21.705.888.940,22**
1	Dinas Pendidikan	175.435.004,00	23.230.720,00	0,00	0,00	198.665.724,00
2	Dinas Kesehatan	213.474.913,08	22.471.043,48	0,00	0,00	235.945.956,56
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	21.338.541,95	3.012.500,04	0,00	0,00	24.351.041,99
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	1.400.362.897,00	13.287.896.637,00	0,00	14.688.259.534,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.963.451.016,00	14.464.918,00	1.414.827.815,00	13.287.896.637,00	104.847.112,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Sosial	157.750.615,97	19.515.540,00	0,00	0,00	177.266.155,97
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	76.161.501,08	15.249.402,08	0,00	9.399.657,08	82.011.246,08
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perhubungan	67.578.344,28	6.625.027,28	0,00	5,47	74.203.366,09
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.679.086,33	1.195.165,33	0,00	0,00	7.874.251,66
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	30.855.370,64	4.044.437,60	0,00	1,87	34.899.806,37
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	27.905.625,00	2.767.500,00	0,00	0,00	30.673.125,00
21	Dinas Kebudayaan	14.777.583,67	2.074.423,99	0,00	0,00	16.852.007,66
22	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	2.619.225.945,00	294.241.045,49	294.241.042,68	0,00	3.207.708.033,17
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	232.571.491,35	53.353.630,00	250.902.457,54	0,00	536.827.578,89
24	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.846.982,50	11.632.758,00	0,00	0,00	16.479.740,50
27	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Biro Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Biro Umum	1.283.147.562,00	79.144.173,92	0,00	0,00	1.362.291.735,92
34	Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Inspektorat	17.622.673,97	2.243.320,08	0,00	0,00	19.865.994,05
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	14.223.146,34	1.177.088,00	0,00	0,00	15.400.234,34
37	Badan Pendapatan Daerah	22.817.765,00	1.512.780,00	0,00	0,00	24.330.545,00
38	Badan Kepegawaian dan Korpri	10.354.290,67	1.323.951,96	0,00	0,31	11.678.242,32
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Badan Penghubung Daerah	832.151.142,07	1.139.700,00	2.166.666,58	0,00	835.457.508,65
43	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	29.005.424.963,95	**25.295.808.664,94**

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Konstruksi dalam pengerjaan tersebut pada umumnya merupakan pembangunan fisik yang jangka waktu pelaksanaanya melebihi satu tahun anggaran yang diikat dengan kontrak tahun jamak.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo awal aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 1 Januari 2025 sebesar Rp25.295.808.664,94 dengan mutasi aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.210 Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2025

ASET TETAP KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN				
I	**Saldo Awal ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN, 1 Januari 2025**			**25.295.808.664,94**
II	**Penambahan :**			
	1	Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan	2.731.351.942,48	
	2	Mutasi Tambah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan antar OPD	975.142.000,00	
	3	Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	978.264.356,53	
		Total Penambahan :		**4.684.758.299,01**
III	**Pengurangan :**			
	1	Mutasi Kurang Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan antar OPD	975.142.000,00	
		Total Pengurangan :		**975.142.000,00**
IV	**Saldo Akhir ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN, 31 Desember 2025**			**29.005.424.963,95**

Berdasarkan tabel mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penambahan Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp4.684.758.299,01 berasal dari:
   1. Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan sebesar Rp2.731.351.942,48 antara lain:
      a. Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan *Detail Engineering Design* (DED) Perencanaan Kantor BPSK Kota Batam Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp33.816.094,00
      b. Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp1.404.004.583,00 diantaranya:
         1) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan *Review* Desain Pembangunan Jembatan Batam - Bintan sebesar Rp155.652.081,00
         2) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan *Flyover* Simpang Kota Piring sebesar Rp284.687.000,00
         3) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Minum (SPAM) Kolong Enam Kijang sebesar Rp340.929.951,00
         4) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Kolong Enam Kijang sebesar Rp338.654.451,00
         5) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Drainase Kp. Cenot dan Kado Desa Mepar Kecamatan Lingga sebesar Rp94.641.900,00

6) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Drainase Pengendalian Banjir di Kawasan Surau Zamzatul Qithamir Kp. Wacopek Kel. Gunung Lengkuas, Bintan pada sebesar Rp94.641.900,00
7) Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Drainase Lorong Fajar Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Lingga sebesar Rp94.797.300,00

c. Kapitalisasi Masuk Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan (Tunda Bayar tahun 2025) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp1.202.955.265,48 antara lain:
1. Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan (Tunda Bayar tahun 2025) *Review* Desain Pembangunan Jembatan Batam - Bintan sebesar Rp334.255.743,00
2. Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan (Tunda Bayar tahun 2025) DED Pembangunan *Flyover* Simpang Kota Piring sebesar Rp664.269.800,00
3. Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan (Tunda Bayar tahun 2025) Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Pintu Air Dusun 4 Desa Sebesi Kec. Kundur sebesar Rp18.881.366,40
4. Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan (Tunda Bayar tahun 2025) Peningkatan Jalan Dusun 2 Parit gantung Desa Sei ungar Kec. kundur Kabupaten Karimun sebesar Rp99.670.400,00
5. Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan (Tunda Bayar tahun 2025) Drainase Desa Pangke Barat Ke. Merah Barat Kabupaten karimun sebesar Rp85.877.956,08

d. Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan (Tunda Bayar tahun 2025) Pekerjaan Penataan Ruang SMAN 1 Karimun pada Dinas Pendidikan sebesar Rp90.576.000,00

2. Mutasi BMD Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan BAST Nomor 109/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 08 September 2025 dan SK Gubernur Kepulauan Riau No.1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp975.142.000,00
3. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (Realisasi fisik Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Permai Kampung Beko Pulau Kasu Kota Batam 80%) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp978.264.356,53

B. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp975.142.000,00 berasal dari Mutasi BMD Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan SK Gubernur

Kepulauan Riau Nomor 1001 Tahun 2025 tanggal 16 September 2025 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

C. Saldo akhir Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp29.005.424.963,95.

Adapun rincian mutasi aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per OPD dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.5.211 Rincian Mutasi Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Pendidikan	797.248.726,00	0,00	90.576.000,00	0,00	887.824.726,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	923.202.500,00	0,00	0,00	0,00	923.202.500,00
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	34.870.000,00	0,00	0,00	0,00	34.870.000,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	13.644.767.774,04	0,00	3.582.101.848,48	0,00	17.226.869.622,52
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	975.142.000,00	0,00	0,00	975.142.000,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	29.977.200,00	0,00	0,00	0,00	29.977.200,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	184.467.000,00	0,00	0,00	0,00	184.467.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	4.344.088.844,90	0,00	978.264.356,53	0,00	5.322.353.201,43
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kebudayaan	4.250.805.800,00	0,00	0,00	0,00	4.250.805.800,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Kelautan dan Perikanan	99.413.820,00	0,00	0,00	0,00	99.413.820,00
Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	11.825.000,00	0,00	0,00	0,00	11.825.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	33.816.094,00	0,00	33.816.094,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penghubung Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**25.295.808.664,94**	**0,00**	**4.684.758.299,01**	**975.142.000,00**	**29.005.424.963,95**

7.5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	(4.943.566.093.920,46)	**(4.549.816.476.728,71)**

Akumulasi penyusutan adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan

penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Pengukuran penyusutan aset tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
b) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.
c) Masa manfaat aset tetap ditetapkan.
d) Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap dilakukan setiap bulan dimulai pada bulan perolehan aset tetap bersangkutan.
e) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method)*, dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
f) Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
g) Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

Adapun rincian Akumulasi Penyusutan per OPD dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.5.212 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per OPD

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
		4.549.816.476.728,71	**378.279.897.533,32**	**425.456.725.986,48**	**409.987.006.328,05**	**4.943.566.093.920,46**
1	Dinas Pendidikan	660.901.939.752,70	93.387.323.691,57	3.672.030.170,73	215.964.766,98	757.745.328.848,02
2	Dinas Kesehatan	60.056.275.590,84	1.522.361.810,96	0,00	2.740.972.432,86	58.837.664.968,94
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	309.317.565.946,97	35.851.282.327,00	35.343.505.332,63	0,00	380.512.353.606,60
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	98.958.493.486,10	11.600.455.090,91	2.383.477.004,51	49.300.000,00	112.893.125.581,52
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.649.843.758.387,32	156.199.154.656,04	326.598.778.457,10	462.991.073,37	2.132.178.700.427,09

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	386.361.026.160,92	1.029.624.681,10	3.467.923.135,23	374.620.461.783,95	16.238.112.193,30
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.297.244.419,32	545.740.906,34	0,00	792.856.629,35	5.050.128.696,31
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	8.229.784.798,01	606.342.215,91	0,00	137.888.392,92	8.698.238.621,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.668.859.964,05	351.442.417,85	0,00	13.791.259,71	16.006.511.122,19
10	Dinas Sosial	4.652.003.173,71	382.021.136,33	36.990.750,00	481.501.511,32	4.589.513.548,72
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.345.172.566,14	370.041.469,65	387.398.039,40	44.146.586,86	5.058.465.488,33
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	6.034.722.561,49	343.396.672,88	149.009.523,72	381.517.045,29	6.145.611.712,80
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	51.952.605.045,19	3.664.523.783,39	0,00	0,00	55.617.128.828,58
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18.344.600.922,04	770.925.833,09	0,00	230.879.821,09	18.884.646.934,04
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.415.866.641,48	399.189.264,39	0,00	47,73	8.815.055.858,14
16	Dinas Perhubungan	303.281.724.163,77	18.510.804.207,47	0,00	7.321.597.239,79	314.470.931.131,45
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	23.561.429.665,56	1.346.528.431,31	137.888.392,92	400.832.493,41	24.645.013.996,38
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.804.529.527,21	213.740.431,17	224,06	2,00	5.018.270.180,44
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	7.251.648.759,50	472.389.156,14	0,00	451.799,32	7.723.586.116,32
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	15.631.684.359,56	1.932.629.368,94	38.538,00	669.076.363,82	16.895.275.902,68
21	Dinas Kebudayaan	14.932.116.674,35	2.370.679.489,67	0,00	54.620.000,00	17.248.176.164,02
22	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	24.895.401.430,42	902.376.879,82	294.241.045,72	4.078.750,51	26.087.940.605,45
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	69.501.191.611,98	4.208.035.231,80	751.682.303,42	122.303.533,93	74.338.605.613,27
24	Dinas Pariwisata	8.551.367.033,25	416.212.775,69	9.645.639,89	86.014.973,00	8.891.210.475,83
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	87.739.745.370,47	7.937.085.103,23	96.345.555,50	0,00	95.773.176.029,20

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.742.772.204,91	615.042.048,12	0,00	859.658.745,84	7.498.155.507,19
27	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.126.279.389,67	127.021.275,97	20,67	326.600.000,00	3.926.700.686,31
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	5.386.192.659,43	2.603.253.809,70	28.737.869.334,81	471.934.380,00	36.255.381.423,94
29	Biro Pengadaan Barang/Jasa	6.519.190.002,56	295.389.696,02	0,00	11.717.812,60	6.802.861.885,98
30	Biro Perekonomian dan Pembangunan	4.752.408.303,91	136.161.385,71	150.500.076,95	251.050.000,00	4.788.019.766,57
31	Biro Organisasi	1.874.499.408,33	164.712.920,00	0,00	0,00	2.039.212.328,33
32	Biro Administrasi Pimpinan	11.046.729.152,21	401.800.540,14	19.579.999,98	805.860.400,00	10.662.249.292,33
33	Biro Umum	275.684.382.897,05	8.752.491.585,95	437.278.765,83	14.048.177.068,44	270.825.976.180,39
34	Biro Hukum	1.979.979.451,42	66.232.101,88	0,00	0,00	2.046.211.553,30
35	Inspektorat Daerah	8.945.193.783,22	1.352.301.669,35	140.850.000,06	258.526.344,14	10.179.819.108,49
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	205.491.684.952,23	3.022.269.183,81	0,00	4.048.744.628,56	204.465.209.507,48
37	Badan Pendapatan Daerah	55.486.149.519,74	5.410.437.993,34	4.092.989.058,70	30.470.458,80	64.959.106.112,98
38	Badan Kepegawaian dan Korpri	7.586.085.542,12	439.541.257,71	44.931.873,03	0,99	8.070.558.671,87
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.048.934.769,59	727.177.789,02	7,29	0,00	2.776.112.565,90
40	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.053.372.118,61	842.672.408,64	7.668.917,53	10.078.750,00	12.893.634.694,78
41	Sekretariat DPRD	77.869.286.468,22	5.150.403.124,31	18.293.808.148,06	16.254.562,50	101.297.243.178,09
42	Badan Penghubung Daerah	12.302.579.945,63	2.624.032.798,80	202.295.670,74	16.686.666,58	15.112.221.748,59
43	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	389.998.147,51	214.648.912,20	0,00	2,39	604.647.057,32

7.5.3.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	535.191.876.315,99	**541.842.363.389,04**

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang termasuk aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset

kerjasama dengan Pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Aset lainnya per 31 Desember 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp535.191.876.315,99 yang terdiri dari:

Tagihan Jangka Panjang/ Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tagihan Jangka Panjang/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain, merupakan suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah, sedangkan Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan, maka bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian yang terjadi berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp992.008.950,00 dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.5.213 Rincian Daftar Tuntutan Kerugian Daerah

No	Jenis Kerugian	SKTJM/SKP					Uraian	Nilai Terhutang	Pengembalian s.d. 31 Des 2025	Saldo
		Nomor	Tanggal Penerbitan	Nilai TP/TGR Berdasarkan SKTJM/SKP	Jangka Waktu Penyelesaian TP/TGR (bulan)	Jaminan				
1	TGR Non Bendahara	*tidak ada SKTJM*				-	Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) DPRD Prov. Kepri Tahun Anggaran 2006	450.168.000,00	82.000.000,00	368.168.000,00
2	Tuntutan Perbendaharaan	SKTJM atas Nama Ipan	01 November 2010	706.668.199,00	24 bulan	Sertifikat Tanah Nomor 797 Tahun 1984	Pengembalian Bendahara Pengeluaran	706.668.199,00	101.075.249,00	605.592.950,00
3	TGR Non Bendahara	004/SKTJM/RUGDA-BPK/2017	16 August 2017	28.500.000,00	24 bulan	Surat Pengoperasian Penguasaan Tanah (Alas Hak)	Pengembalian Belanja	28.500.000,00	18.752.000,00	9.748.000,00
4	TGR Non Bendahara	005/SKTJM/RUGDA-BPK/2017	04 September 2017	12.000.000,00	24 bulan	BPKB Kendaraan Roda Dua	Pengembalian Belanja	12.000.000,00	3.500.000,00	8.500.000,00
Jumlah								**1.197.336.199,00**	**205.327.249,00**	**992.008.950,00**

Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun "Beban Amortisasi" terhadap akun "Akumulasi Amortisasi". Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Aset Tidak berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp24.055.483.107,06 dengan uraian sebagai berikut:

- Nilai Perolehan	26.469.264.427,06
- Amortisasi	(2.413.781.320,00)
Jumlah Aset Tidak Berwujud	**24.055.483.107,06**

Amortisasi per Jenis Aset Tidak Berwujud dijelaskan lebih rinci pada **Lampiran 7.** Tabel rekapitulasi per jenis Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.214 Rekapitulasi per Jenis Aset Tidak Berwujud

No.	Jenis Aset Tidak Berwujud	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi/ Penyusutan 1 Jan 2025	Amortisasi/Penyusutan		Akumulasi Amortisasi/ Penyusutan 31 Desember 2025	Nilai Buku
				Semester 1	Semester 2		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 4+5+6*	*8 = 3-7*
1	Lisensi dan Frenchise	123.841.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.841.649,00
2	Software	23.358.457.438,06	2.413.781.320,00	0,00	0,00	2.413.781.320,00	20.944.676.118,06
3	Software Lainnya	493.627.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.627.430,00
4	Kajian	2.493.337.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.337.910,00
	JUMLAH	**26.469.264.427,06**	**2.413.781.320,00**	**0,00**	**0,00**	**2.413.781.320,00**	**24.055.483.107,06**

Mutasi Aset Tidak Berwujud pada tahun 2025 dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.215 Mutasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2025

ASET TAK BERWUJUD				
I	**Saldo Awal ASET TAK BERWUJUD, 1 Januari 2025**			**26.348.603.927,06**
II	**Penambahan :**			
	1	Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Tahun 2025	120.660.500,00	
		Total Penambahan :		**120.660.500,00**
IV	**Saldo Akhir ASET TAK BERWUJUD, 31 Desember 2025**			**26.469.264.427,06**

Berdasarkan tabel mutasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penambahan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp120.660.500,00 berasal dari Realisasi belanja Modal Aset Tidak Berwujud berasal dari:
   a) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp88.855.500,00
   b) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp31.805.000,00

B. Saldo Akhir Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2025 senilai Rp26.469.264.427,06

Adapun rincian mutasi Aset Tidak Berwujud per OPD dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.216 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Pendidikan	11.932.014.480,00	0,00	0,00	0,00	11.932.014.480,00
Dinas Kesehatan	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	5.819.275.000,06	0,00	0,00	0,00	5.819.275.000,06
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	1.462.280.900,00	0,00	0,00	0,00	1.462.280.900,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.452.437.910,00	0,00	0,00	0,00	2.452.437.910,00
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	27.900.000,00	0,00	0,00	0,00	27.900.000,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	34.650.000,00	0,00	0,00	0,00	34.650.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.101.451,00	0,00	0,00	0,00	15.101.451,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	590.700.000,00	0,00	0,00	0,00	590.700.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	259.000.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	63.998.500,00	0,00	0,00	0,00	63.998.500,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN DARI BELANJA MODAL (LRA)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 2 + 3 + 4 - 5
Dinas Kebudayaan	35.167.000,00	0,00	0,00	0,00	35.167.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	795.624.420,00	0,00	0,00	0,00	795.624.420,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	494.166.000,00	0,00	0,00	0,00	494.166.000,00
Dinas Pariwisata	28.160.000,00	0,00	0,00	0,00	28.160.000,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	39.400.000,00	0,00	0,00	0,00	39.400.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	401.788.200,00	0,00	0,00	0,00	401.788.200,00
Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Umum	248.831.000,00	0,00	0,00	0,00	248.831.000,00
Biro Hukum	49.324.000,00	0,00	0,00	0,00	49.324.000,00
Inspektorat Daerah	350.945.000,00	0,00	0,00	0,00	350.945.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	386.585.000,00	88.855.500,00	0,00	0,00	475.440.500,00
Badan Pendapatan Daerah	113.141.649,00	31.805.000,00	0,00	0,00	144.946.649,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	62.352.711,00	0,00	0,00	0,00	62.352.711,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	369.782.476,00	0,00	0,00	0,00	369.782.476,00
Badan Penghubung Daerah	140.028.230,00	0,00	0,00	0,00	140.028.230,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**26.348.603.927,06**	**120.660.500,00**	**0,00**	**0,00**	**26.469.264.427,06**

Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp356.329.356.721,02, terdiri atas:

1. Usulan Penghapusan Aset Tetap akan Dihibahkan/Rusak Berat

Usulan penghapusan Aset Tetap termasuk Aset Tetap yang direncanakan untuk dihibahkan/dihapuskan sebesar Rp275.903.850.022,38 dengan akumulasi penyusutan atas aset tetap yang direncanakan untuk dihibahkan/dihapuskan sebesar Rp(44.396.614.613,55).

Tabel 7.5.217 Mutasi Aset Lain-lain atas Aset yang akan dihibahkan/rusak berat

ASET LAIN-LAIN - ASET YANG AKAN DIHIBAHKAN/RUSAK BERAT				
I	**Saldo Awal ASET LAIN LAIN, 1 Januari 2025**			**276.356.139.582,38**
II	**Penambahan :**			
	1	Realisasi Belanja Modal Aset Lain-lain 2025	479.584.000,00	
	2	Reklasifikasi Masuk Aset Lain-Lain dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	16.893.521.441,00	
	3	Reklasifikasi Masuk Aset Lain-Lain dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	
	4	Reklasifikasi Masuk Aset Lain-Lain dari Aset Tetap Lainnya	685.786.654,00	
	5	Mutasi Masuk Aset Lain-lain karena Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD	118.851.487.006,39	
		Total Penambahan :		**136.960.379.101,39**
III	**Pengurangan :**			
	1	Penghapusan Aset Lain-lain karena dihibahkan	4.965.589.550,00	
	2	Penghapusan Aset Lain-lain karena dimusnahkan	3.661.625.211,00	
	3	Penghapusan Aset Lain-lain karena sebab lain	1.537.700.730,00	
	4	Penghapusan Aset Lain-lain karena penjualan	7.916.682.164,00	
	5	Mutasi keluar Aset Lain-lain karena Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD	118.851.487.006,39	
	6	Reklasifikasi Keluar Aset Lain-Lain ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	272.146.000,00	
	7	Reklasifikasi Keluar Aset Lain-Lain ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	28.023.000,00	
	8	Reklasifikasi Keluar Aset Lain-Lain ke Belanja Pemeliharaan	179.415.000,00	
		Total Pengurangan :		**137.412.668.661,39**
		-		
IV	**SALDO AKHIR ASET LAIN-LAIN - ASET YANG AKAN DIHIBAHKAN/RUSAK BERAT, 31 Desember 2025**			**275.903.850.022,38**

Berdasarkan tabel mutasi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penambahan Aset Lain-lain sebesar Rp136.960.379.101,39 antara lain:

1. Realisasi Belanja Modal Aset Lainya BLUD 2025 pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp479.584.000,00
2. Reklasifikasi Masuk Aset Lain-Lain dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp16.893.521.441,00 antara lain :
   a. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya akibat usulan pemusnahan pada Inspektorat Daerah berdasarkan Persetujuan Pemusnahan

Barang Milik Daerah Nomor B/000.2.4/017.1/BKAD-SET/2025, Tanggal 3 Januari 2025 sebesar Rp258.038.100,00.

b. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan pemusnahan BMD pada Dinas Perbedayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berdasarkan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/000.2.3.2/208.2/BKAD-SET/2025, Tanggal 28 Februari 2025 sebesar Rp350.443.360,00

c. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp387.747.484,00 antara lain:

    1) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan pemusnahan BMD berdasarkan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/000.2.3.2/504.1/BKAD-SET/2025, Tanggal 4 Juni 2025 sebesar Rp58.728.091,00

    2) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan pemusnahan BMD berdasarkan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/000.2.3.2/504.2/BKAD-SET/2025, Tanggal 4 Juni 2025 sebesar Rp93.578.920,00

    3) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan Penjualan BMD berdasarkan Permohonan Penjualan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/032.4/582/BKAD-SET/2024, Tanggal 8 Mei 2024 sebesar Rp235.440.473,00.

d. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan Pemusnahan BMD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/000.2.4/1049.3/BKAD-SET/2025, Tanggal 31 Oktober 2025 sebesar Rp596.776.018,00.

e. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan Pemusnahan BMD pada Biro Administrasi Pimpinan berdasarkan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/000.2.4/1049.2/BKAD-SET/2025, Tanggal 31 Oktober 2025 sebesar Rp732.349.200,00.

f. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan Penjualan BMD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Permohonan Penjualan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/032.4/582/BKAD-SET/2024, Tanggal 8 Mei 2024 sebesar Rp859.659.000,00.

g. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan Penjualan BMD pada Biro Umum berdasarkan Permohonan Penjualan

Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/032.4/582/BKAD-SET/2024, Tanggal 8 Mei 2024 sebesar Rp9.141.218.549,00.

h. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan Penjualan BMD pada Dinas Sosial berdasarkan Permohonan Penjualan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/032.4/582/BKAD-SET/2024, Tanggal 8 Mei 2024 sebesar Rp313.488.000,00

i. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan Penjualan BMD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Permohonan Penjualan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/032.4/582/BKAD-SET/2024, Tanggal 8 Mei 2024 sebesar Rp200.991.500,00.

j. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan Penghapusan BMD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang) berdasarkan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah Nomor B/000.2.4/637.2/BKAD-SET/2025, Tanggal 11 Juli 2025 sebesar Rp1.018.936.230,00.

k. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan Penjualan BMD pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Permohonan Penjualan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/032.4/582/BKAD-SET/2024, Tanggal 8 Mei 2024 sebesar Rp500.000.000,00.

l. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang merupakan usulan Pemusnahan BMD pada Dinas Kebudayaan berdasarkan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/000.2.3.2/1017.2/DISBUD-SET/2025, Tanggal 17 Oktober 2025 sebesar Rp54.620.000,00.

m. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain yang merupakan Hibah BMD pada Biro Umum berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Pemerintah Kota Batam Nomor B/000.2.3.2/476.3/BKAD-SET/ 2025, Nomor 159.1/900.1.4.3 /V/2025 Tanggal 19 Mei 2025 sebesar Rp2.243.900.000,00.

n. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain akibat Usulan Pemusnahan pada Dinas Pendidikan (Kuasa Pengguna Barang Dinas Pendidikan pada SMK Negeri 1 Tanjungpinang) berdasarkan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah B/000.2.4/911.1/BKAD-SET/2025, Tanggal 15 September 2025 sebesar Rp235.354.000,00

3. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya yang merupakan usulan pemusnahan BMD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/000.2.4/721.4/BKAD-SET/2025, Tanggal 30 Juli 2025 sebesar Rp50.000.000,00.

4. Reklasifikasi Masuk Aset Lain-Lain dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp685.786.654,00 antara lain:

    a. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lainnnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp666.151.654,00 antara lain :
        1) Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain yang merupakan usulan pemusnahan BMD berdasarkan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/032/781.3/BKAD-SET/2024, Tanggal 2 September 2024 sebesar Rp56.828.000,00.
        2) Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain yang merupakan usulan pemusnahan BMD pada Dinas Pendidikan (SMKN 1 Tanjungpinang) berdasarkan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah B/000.2.4/911.1/BKAD-SET/2025, Tanggal 15 September 2025 sebesar Rp303.885.560,00.
        3) Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain yang merupakan usulan pemusnahan BMD berdasarkan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/000.2.4/945.1/BKAD-SET/2025, Tanggal 24 September 2025 sebesar Rp305.438.094,00.

    b. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain yang merupakan usulan pemusnahan BMD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berdasarkan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor B/000.2.3.2/208.2/BKAD-SET/2025, Tanggal 28 Februari 2025 sebesar Rp19.635.000,00.

5. Mutasi Masuk Aset Lain-lain karena Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD sebesar Rp118.851.487.006,39 antara lain :

    a. Mutasi Masuk Aset Lain-lain karena Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Berita Acara Serah Terima Mutasi Aset Nomor 109/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 8 September 2025 sebesar Rp117.720.396.627,79.

    b. Mutasi Masuk Aset Lain-lain karena Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Berita Acara Serah Terima Mutasi Aset Nomor 105/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 8 September 2025 sebesar Rp843.941.770,00.

    c. Mutasi Masuk Aset Lain-lain karena Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD pada Dinas Pendidikan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Berita Acara Serah Terima Mutasi Aset Nomor 104/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 8 September 2025 sebesar Rp287.148.608,60.

B. Pengurangan Aset Lain-lain sebesar Rp137.412.668.661,39 berasal dari:

1. Penghapusan Aset Lain-lain sebesar Rp4.965.589.550,00 merupakan Penghapusan Aset Lain-lain karena dihibahkan, antara lain:
    a. Penghapusan BMD pada Biro Umum sebesar Rp2.852.409.000,00, antara lain:
        1) Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 682 Tahun 2025, Tanggal 4 Juni 2025 sebesar Rp2.243.900.000,00
        2) Penghapusan BMD berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor B/000.2.3.2/1125.2/BKAD-SET/2025 dan 181/1.1.02/6/BA/2025 Tanggal 04 Desember 2025 sebesar Rp608.509.000,00
    b. Penghapusan BMD pada Dinas Perhubungan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1318 Tahun 2025, Tanggal 18 Desember 2025 sebesar Rp2.113.180.550,00
2. Penghapusan Aset Lain-lain sebesar Rp3.661.625.211,00 merupakan penghapusan aset lain-lain karena dimusnahkan, antara lain :
    a. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 602/KPTS-27/I/2025, Tanggal 20 Januari 2025 pada Inspektorat Daerah sebesar Rp273.538.100,00.
    b. Penghapusan BMD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp420.078.360,00 antara lain:
        1) Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 880/KPTS-27/III/2025, Tanggal 24 Maret 2025 sebesar Rp370.078.360,00.
        2) Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1311/KPTS-27/VIII/2025, Tanggal 6 Agustus 2025 sebesar Rp50.000.000,00.
    c. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1213/KPTS-27/VII/2025, Tanggal 9 Juli 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp159.251.011,00.
    d. Penghapusan BMD pada Dinas Pendidikan sebesar Rp901.505.654,00 antara lain:
        1) Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1295/KPTS-27/VIII/2025, Tanggal 1 Agustus 2025 pada Dinas Pendidikan (SMKN 2 Batam) sebesar Rp56.828.000,00.
        2) Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1493/KPTS-27/IX/2025 Tanggal 29 September 2025 pada Dinas Pendidikan (SMKN 1 Tanjungpinang) sebesar Rp539.239.560,00.

3) Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1552/KPTS-27/X/2025, Tanggal 17 Oktober 2025 pada Dinas Pendidikan (SMAN 6 Tanjungpinang) sebesar Rp305.438.094,00

e. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1322/KPTS-27/VIII/2025, Tanggal 8 Agustus 2025 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp71.089.000,00.
f. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1725/KPTS-27/XII/2025, Tanggal 12 Desember 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp1.049.193.886,00.
g. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1725/KPTS-27/XII/2025, Tanggal 12 Desember 2025 pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp54.620.000,00.
h. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1237/KPTS-27/XI/2025, Tanggal 24 November 2025 pada Biro Administrasi Pimpinan sebesar Rp732.349.200,00.

3. Penghapusan Aset Lain-lain sebesar Rp1.537.700.730,00 merupakan Penghapusan Aset Lain-lain karena sebab lain, antara lain:
   a. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1372/KPTS-27/VIII/2025, Tanggal 25 Agustus 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp467.342.500,00.
   b. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp26.750.000,00.
   c. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 812 Tahun 2025, Tanggal 25 Agustus 2025 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang) sebesar Rp1.018.936.230,00.
   d. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp24.672.000,00.

4. Penghapusan Aset Lain-lain sebesar Rp7.916.682.164,00 merupakan penghapusan aset lain-lain karena penjualan, antara lain:
   a. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1027 Tahun 2025, Tanggal 23 September 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp235.440.473,00.
   b. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1027 Tahun 2025, Tanggal 23 September 2025 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp715.310.000,00.
   c. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1027 Tahun 2025, Tanggal 23 September 2025 pada Biro Umum sebesar Rp5.087.032.091,00.

d. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1027 Tahun 2025, Tanggal 23 September 2025 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp859.659.000,00.
e. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1027 Tahun 2025, Tanggal 23 September 2025 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp330.010.000,00.
f. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1027 Tahun 2025, Tanggal 23 September 2025 pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp344.893.600,00.
g. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1027 Tahun 2025, Tanggal 23 September 2025 pada Dinas Sosial sebesar Rp313.488.000,00.
h. Penghapusan BMD berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1027 Tahun 2025, Tanggal 23 September 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp30.849.000,00.

5. Penghapusan BMD sebesar Rp118.851.487.006,39 merupakan Penghapusan BMD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dikarenakan penyerahan atau pengalihan status penggunaan BMD berdasarkan Berita Acara Serah Terima Mutasi Aset Nomor 104/BAST/DPKP-PK/TL/2025, Tanggal 8 September 2025 sebesar Rp287.148.608,60, Berita Acara Serah Terima Mutasi Aset Nomor 105/BAST/DPKP-PK/TL/2025 Tanggal 8 September 2025 sebesar Rp843.941.770,00 dan Berita Acara Serah Terima Mutasi Aset Nomor 109/BAST/DPKP-PK/TL/2025, Tanggal 8 September 2025 sebesar Rp117.720.396.627,79.
6. Reklasifikasi Keluar Aset Lain-Lain ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp272.146.000,00
7. Reklasifikasi Keluar Aset Lain-Lain ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp28.023.000,00
8. Reklasifikasi Keluar Aset Lain-Lain ke Belanja Pemeliharaan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp179.415.000,00

C. Saldo akhir aset lain-lain yang akan dihibahkan/rusak berat sebesar Rp275.903.850.022,38.

Tabel 7.5.218 Rincian Mutasi Aset Lain-lain – Aset yang akan dihibahkan/rusak berat per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5 = 2 + 3 - 4
Dinas Pendidikan	58.707.781.620,89	1.188.654.262,60	901.505.654,00	58.994.930.229,49
Dinas Kesehatan	6.364.786.737,50	0,00	0,00	6.364.786.737,50
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	17.561.084.497,00	0,00	0,00	17.561.084.497,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5 = 2 + 3 - 4
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	24.607.800.719,00	479.584.000,00	849.149.600,00	24.238.235.119,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	15.258.157.993,00	117.720.396.627,79	0,00	132.978.554.620,79
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	118.851.487.006,39	0,00	118.851.487.006,39	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	456.717.868,00	596.776.018,00	1.049.193.886,00	4.300.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	47.625.000,00	0,00	0,00	47.625.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	240.461.796,00	0,00	0,00	240.461.796,00
Dinas Sosial	0,00	313.488.000,00	313.488.000,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.865.794.702,00	843.941.770,00	0,00	2.709.736.472,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	420.078.360,00	420.078.360,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	2.224.178.000,00	0,00	0,00	2.224.178.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	31.207.820,00	200.991.500,00	30.849.000,00	201.350.320,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	6.445.226.750,00	0,00	2.443.190.550,00	4.002.036.200,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	6.944.000,00	387.747.484,00	394.691.484,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.701.225.241,00	500.000.000,00	0,00	3.201.225.241,00
Dinas Kebudayaan	0,00	54.620.000,00	54.620.000,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49.442.800,00	0,00	0,00	49.442.800,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	6.712.612.472,70	0,00	467.342.500,00	6.245.269.972,70
Dinas Pariwisata	1.767.715.600,20	0,00	0,00	1.767.715.600,20
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.554.838.500,00	0,00	0,00	4.554.838.500,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	80.557.200,00	859.659.000,00	859.659.000,00	80.557.200,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	270.755.520,00	0,00	0,00	270.755.520,00
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.126.149.799,70	0,00	0,00	1.126.149.799,70
Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	725.124.200,00	732.349.200,00	732.349.200,00	725.124.200,00
Biro Umum	2.979.218.919,00	11.385.118.549,00	7.939.441.091,00	6.424.896.377,00
Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	25.500.000,00	258.038.100,00	273.538.100,00	10.000.000,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5 = 2 + 3 - 4
Badan Keuangan dan Aset Daerah	764.060.000,00	1.018.936.230,00	1.760.996.230,00	22.000.000,00
Badan Pendapatan Daerah	49.123.000,00	0,00	0,00	49.123.000,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	1.761.058.820,00	0,00	0,00	1.761.058.820,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.240.000,00	0,00	0,00	6.240.000,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	113.263.000,00	0,00	71.089.000,00	42.174.000,00
Badan Penghubung Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**276.356.139.582,38**	**136.960.379.101,39**	**137.412.668.661,39**	**275.903.850.022,38**

Sedangkan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain untuk Aset yang akan dihibahkan/rusak berat pada tahun 2025 dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.219 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset yang akan dihibahkan/rusak berat per OPD

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5 = 2 + 3 - 4
Dinas Pendidikan	93.648.822,00	215.964.766,98	215.964.766,98	93.648.822,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	17.561.084.497,00	0,00	0,00	17.561.084.497,00
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	14.044.474.579,00	0,00	344.893.600,00	13.699.580.979,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	495.090.406,00	0,00	0,00	495.090.406,00
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	170.105.644,00	0,00	170.105.644,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	596.776.002,00	596.776.002,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	84.963.184,00	0,00	0,00	84.963.184,00
Dinas Sosial	0,00	313.488.000,00	313.488.000,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.755.663.537,00	170.105.644,00	0,00	1.925.769.181,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	377.926.349,81	377.926.349,81	0,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	200.991.500,00	30.849.000,00	170.142.500,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	598.560.029,00	0,00	545.730.515,00	52.829.514,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	4.577.218,00	387.747.484,00	392.324.702,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	302.579.978,00	500.000.000,00	0,00	802.579.978,00
Dinas Kebudayaan	0,00	54.620.000,00	54.620.000,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	112.941.104,65	0,00	0,00	112.941.104,65
Dinas Pariwisata	189.620.887,20	0,00	0,00	189.620.887,20
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	859.658.745,84	859.658.745,84	0,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	270.755.520,00	0,00	0,00	270.755.520,00

PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5 = 2 + 3 - 4
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.100.817.845,70	0,00	0,00	1.100.817.845,70
Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Administrasi Pimpinan	528.458.032,00	721.107.400,00	721.107.400,00	528.458.032,00
Biro Umum	1.394.010.259,00	11.385.118.549,00	7.330.932.091,00	5.448.196.717,00
Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	0,00	257.484.794,67	257.484.794,67	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	669.955.000,00	1.018.936.200,00	1.666.891.200,00	22.000.000,00
Badan Pendapatan Daerah	48.871.000,00	0,00	0,00	48.871.000,00
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	1.761.058.820,00	0,00	0,00	1.761.058.820,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.240.000,00	0,00	0,00	6.240.000,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	93.054.626,00	0,00	71.089.000,00	21.965.626,00
Badan Penghubung Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**41.286.530.988,55**	**17.059.925.436,30**	**13.949.841.811,30**	**44.396.614.613,55**

2. Piutang kontribusi hasil penjualan logam timah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang sejak Tahun 2012 belum diterima sebesar Rp74.743.000,00;
3. Piutang yang tidak disetujui Klaimnya kepada Askes/Jamsostek pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp658.871.262,89, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.220 Piutang Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
1	ASKES	37.015.108,00
2	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	5.049.750,00
3	Jamsostek	592.803.199,00
4	Jamkesmas	24.003.205,89
	JUMLAH	**658.871.262,89**

4. Pada periode 31 Desember 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo aset lainnya – aset lain-lain sebesar Rp183.029.975,50 yang berasal dari hasil temuan oleh auditor atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa yang belum ditindaklanjuti sampai dengan periode berakhir selanjutnya akan menjadi aset Tuntutan Ganti Kerugian Daerah apabila sudah ditetapkan oleh Majelis TGR.

Tabel 7.5.221 Rekapitulasi hasil temuan auditor yang menambah Aset Lainnya - Aset lain-lain

No	SKPD	Saldo Awal tahun 2024	Penambahan Aset Lain-lain tahun 2025		Saldo Akhir
		Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Aset Lainnya - Aset Lain-lain
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (3+4+5)*
1	Dinas Pendidikan	95.738.378,00	38.759.244,00	0,00	134.497.622,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	13.494.600,00	0,00	13.494.600,00
3	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	0,00	0,00	9.362.514,00	9.362.514,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	0,00	719.650,00	0,00	719.650,00

No	SKPD	Saldo Awal tahun 2024	Penambahan Aset Lain-lain tahun 2025		Saldo Akhir
		Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Aset Lainnya - Aset Lain-lain
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (3+4+5)*
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	0,00	2.368.800,00	0,00	2.368.800,00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	15.691.880,00	0,00	15.691.880,00
7	Biro Umum	0,00	3.128.640,00	0,00	3.128.640,00
8	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	3.766.269,50	0,00	3.766.269,50
	JUMLAH	**95.738.378,00**	**77.929.083,50**	**9.362.514,00**	**183.029.975,50**

5. Selain itu terdapat reklasifikasi aset persediaan barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat yang sudah tidak dalam penguasaan OPD terkait, namun belum didukung dengan administrasi BAST sebesar Rp79.508.862.460,25 antara lain pada Dinas Pendidikan sebesar Rp51.443.186.125,60, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp25.226.395.058,56 dan juga Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman sebesar Rp2.839.281.276,09. Persediaan tersebut berasal dari persediaan Tahun 2020 ke bawah, dan hal tersebut sudah diungkapkan dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 82.B/LHP/XVIII.TJP/05/2021, dikarenakan adanya permasalahan atas penatausahaan persediaan yaitu penyerahan barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga belum didukung dengan naskah perjanjian hibah daerah. Persediaan tersebut sudah tidak memenuhi definisi sebagai persediaan karena sudah tidak dalam penguasaan OPD terkait dan telah diusulkan oleh pengguna barang pada OPD terkait kepada pengelola barang untuk dihapuskan dengan melengkapi administrasi serah terima barang sebelum penghapusan dilakukan, dengan rincian surat usulan sebagai berikut:
   a. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan nomor B/032/233/PUPP.1/2024 tanggal 22 April 2024.
   b. Surat Kepala Dinas Pendidikan nomor 032.1/350/2024 tanggal 22 April 2024.
   c. Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman nomor B/032/52/DPKP/2024 tanggal 22 April 2024.

   Atas dasar usulan penghapusan tersebut persediaan direklasifikasi ke Aset Lain-Lain.

Kas Yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah, disajikan sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada sub rincian objek Uang Jaminan Reklamasi dengan akun lawan Utang Jangka Panjang Lainnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2025 sebesar

Rp198.211.642.151,46 yang merupakan saldo atas jaminan pascatambang dan jaminan reklamasi yang sudah atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang akan digunakan Gubernur untuk menunjuk pihak ketiga jika nantinya perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan komitmennya. Rincian Kas Yang Dibatasi Penggunaannya dijelaskan lebih lanjut dalam Utang Jangka Panjang Lainnya.

Mutasi Aset Lainnya– Kas yang dibatasi pengggunannya dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.222 Mutasi Aset Lainnya - Kas yang Dibatasi Penggunaannya

DANA JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG TAHUN 2025					
Saldo Awal Dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, 1 Januari 2025					**196.353.186.257,62**
	Penambahan :				
	1	**Penempatan dan Penambahan Bunga Deposito dan Koreksi Pencatatan Dana Jaminan Reklamasi**		626.020.566,62	
		Kabupaten Bintan	57.260.078,49		
		Kota Tanjungpinang	276.750,00		
		Kabupaten Lingga	103.502.497,44		
		Kota Batam	25.260.127,00		
		Kabupaten Karimun	438.507.423,63		
		Kabupaten Natuna	1.213.690,06		
	2	**Penempatan dan Penambahan Bunga Deposito, dan Koreksi Pencatatan Dana Jaminan Pascatambang**		6.563.954.523,02	
		Kabupaten Bintan	1.161.825.579,53		
		Kota Tanjungpinang	28.292.828,00		
		Kabupaten Lingga	197.595.758,67		
		Kota Batam	19.686.084,00		
		Kabupaten Karimun	5.156.554.272,82		
		Kabupaten Natuna	0,00		
	Total Penambahan :				**7.189.975.089,64**
	Pengurangan :				
	1	**Pencairan dan Koreksi Pencatatan Dana Jaminan Reklamasi**		1.222.324.026,61	
		Kabupaten Karimun	1.222.324.026,61		
	2	**Pencairan dan Koreksi Pencatatan Dana Jaminan Pascatambang**		4.109.195.169,19	
		Kabupaten Bintan	63.747,00		
		Kabupaten Karimun	4.109.131.422,19		
	Total Pengurangan :				**5.331.519.195,80**
Saldo Akhir Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, 31 Desember 2025					**198.211.642.151,46**

Tabel 7.5.223 Rekapitulasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	TAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	ASET TIDAK BERWUJUD		ASET RUSAK BERAT		KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA	ASET LAIN-LAINNYA	TOTAL ASET LAINNYA
			NILAI PEROLEHAN	AMORTISASI	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			
1	Dinas Pendidikan	0,00	11.932.014.480,000	(1.935.966.000,00)	58.994.930.229,489	(93.648.822,00)	0,00	51.577.683.747,600	120.475.013.635,09
2	Dinas Kesehatan	0,00	66.000.000,000	0,00	6.364.786.737,500	0,00	0,00	13.494.600,00	6.444.281.337,50
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	0,00	5.819.275.000,060	(48.000.000,00)	17.561.084.497,000	(17.561.084.497,00)	0,00	0,00	5.771.275.000,06
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	0,00	1.462.280.900,000	0,00	24.238.235.119,000	(13.699.580.979,00)	0,00	658.871.262,890	12.659.806.302,89
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	2.452.437.910,000	0,00	132.978.554.620,790	(495.090.406,00)	0,00	25.226.395.058,560	160.162.297.183,35
6	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848.643.790,090	2.848.643.790,09
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	2.000.000,000	0,00	4.300.000,000	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	0,00	0,00	0,00	47.625.000,000	0,00	0,00	719.650,00	48.344.650,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	240.461.796,000	(84.963.184,00)	0,00	0,00	155.498.612,00
10	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	9.500.000,000	0,00	2.709.736.472,000	(1.925.769.181,00)	0,00	0,00	793.467.291,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	9.748.000,000	27.900.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.648.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	TAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	ASET TIDAK BERWUJUD		ASET RUSAK BERAT		KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA	ASET LAIN-LAINNYA	TOTAL ASET LAINNYA
			NILAI PEROLEHAN	AMORTISASI	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			
	dan Keluarga Berencana								
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	0,00	34.650.000,000	0,00	2.224.178.000,000	0,00	0,00	2.368.800,00	2.261.196.800,00
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	44.000.000,000	0,00	201.350.320,000	(170.142.500,00)	0,00	0,00	75.207.820,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	15.101.451,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.101.451,00
16	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	4.002.036.200,000	(52.829.514,00)	0,00	0,00	3.949.206.686,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	590.700.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.700.000,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	259.000.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000.000,00
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	63.998.500,000	(14.998.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	43.000.000,000	0,00	3.201.225.241,000	(802.579.978,00)	0,00	0,00	2.441.645.263,00
21	Dinas Kebudayaan	0,00	35.167.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.167.000,00
22	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	0,00	795.624.420,000	(244.999.820,00)	49.442.800,000	0,00	0,00	0,00	600.067.400,00
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	494.166.000,000	0,00	6.245.269.972,700	(112.941.104,65)	0,00	15.691.880,00	6.642.186.748,05
24	Dinas Pariwisata	0,00	28.160.000,000	0,00	1.767.715.600,200	(189.620.887,20)	0,00	0,00	1.606.254.713,00

NO	PERANGKAT DAERAH	TAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	ASET TIDAK BERWUJUD		ASET RUSAK BERAT		KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA	ASET LAIN-LAINNYA	TOTAL ASET LAINNYA
			NILAI PEROLEHAN	AMORTISASI	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	39.400.000,000	0,00	4.554.838.500,000	0,00	0,00	74.743.000,000	4.668.981.500,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	2.750.000,000	0,00	80.557.200,000	0,00	0,00	0,00	83.307.200,00
27	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	270.755.520,000	(270.755.520,00)	0,00	0,00	0,00
29	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	8.700.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00
30	Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	401.788.200,000	0,00	1.126.149.799,700	(1.100.817.845,70)	0,00	0,00	427.120.154,00
31	Biro Organisasi	8.500.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
32	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	725.124.200,000	(528.458.032,00)	0,00	0,00	196.666.168,00
33	Biro Umum	0,00	248.831.000,000	0,00	6.424.896.377,000	(5.448.196.717,00)	0,00	3.128.640,00	1.228.659.300,00
34	Biro Hukum	0,00	49.324.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.324.000,00
35	Inspektorat Daerah	0,00	350.945.000,000	0,00	10.000.000,000	0,00	0,00	0,00	360.945.000,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	973.760.950,000	475.440.500,000	0,00	22.000.000,000	(22.000.000,00)	198.211.642.151,460	3.766.269,50	199.664.609.870,96
37	Badan Pendapatan Daerah	0,00	144.946.649,000	0,00	49.123.000,000	(48.871.000,00)	0,00	0,00	145.198.649,00
38	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	0,00	62.352.711,000	0,00	1.761.058.820,000	(1.761.058.820,00)	0,00	0,00	62.352.711,00
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	6.240.000,000	(6.240.000,00)	0,00	0,00	0,00
40	Badan Perencanaan, Penelitian dan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	PERANGKAT DAERAH	TAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	ASET TIDAK BERWUJUD		ASET RUSAK BERAT		KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA	ASET LAIN-LAINNYA	TOTAL ASET LAINNYA
			NILAI PEROLEHAN	AMORTISASI	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			
	Pengembangan Daerah								
41	Sekretariat DPRD	0,00	369.782.476,000	(169.817.000,00)	42.174.000,000	(21.965.626,00)	0,00	0,00	220.173.850,00
42	Badan Penghubung Daerah	0,00	140.028.230,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.028.230,00
43	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	992.008.950,00	26.469.264.427,06	(2.413.781.320,00)	275.903.850.022,38	(44.396.614.613,55)	198.211.642.151,46	80.425.506.698,64	535.191.876.315,99

7.5.3.1.5. Properti Investasi

Properti Investasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	102.645.507.704,21	**0,00**

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan akuntansi yang mengatur tentang properti investasi sebagai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 17 (PSAP 17) diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan aset Properti Investasi berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1183 Tahun 2025 tentang Aset Tanah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai Properti Investasi dengan nilai perolehan per 31 Desember 2025 sebesar Rp102.645.507.704,21 yang dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.224 Rekapitulasi Aset Properti Investasi Per 31 Desember 2025

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NIBAR	LUAS (m2)	ALAMAT	JENIS HAK	TANGGAL HAK	NOMOR HAK	NAMA PEMEGANG HAK	NILAI PEROLEHAN (Rp)	TANGGAL PEROLEHAN	STATUS PENGGUNAAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12012126000000010000200613101010 40010000006	18.144,00	Tanah Perkantoran /Dompak persil P4	Hak Pakai	29 September 2022	32.05.04.05.4.00072	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	145.152.000,00	26 Desember 2006	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
2	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12012126000000010000200613101010 40010000007	20.000,00	Tanah Perkantoran /Dompak persil P7	Hak Pakai	23 September 2022	32.05.04.05.4.00071	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	140.000.000,00	26 Desember 2006	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
3	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12012126000000010000200613101010 40010000053	13.710,00	Tanah Perkantoran /Dompak persil P 9	Hak Pakai	23 September 2022	32.05.04.05.4.00071	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	311.997.000,00	26 Desember 2006	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12012126000000010000200613101010 40010000054	13.920,00	Tanah Perkantoran /Dompak persil P 8	Hak Pakai	23 September 2022	32.05.04.05.4.00071	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	97.440.000,00	26 Desember 2006	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
5	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12012126000000010000200713101010 40010000087	36.886,00	Tanah Perkantoran /Dompak persil P149	Hak Pakai	29 September 2022	32.05.04.05.4.00072	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	181.727.000,00	27 Desember 2007	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
6	1.3.1.01.02.01.003	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	12012126000000010000200613101020 10030000002	14.280,00	Jl. Dompak Sebrang	Hak Pakai	19 Desember 2019	32.05.04.05.4.00039	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	100.000.000,00	31 Desember 2006	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
7	1.3.1.01.03.07.002	Tanah Untuk Jalan Propinsi	12012100030000000000002020131010 3070020000001	38.310,33	Tanjung Pinang Kota	HPL	20 Desember 2024	NIB. 32.05.000004031.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	101.669.191.704,21	31 Desember 2020	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Jumlah		**155.250,33**						**102.645.507.704,21**		

7.5.3.2. Kewajiban

Kewajiban	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	409.238.846.679,17	**651.254.610.738,43**

Saldo Kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebesar Rp409.238.846.679,17 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp211.027.204.527,71 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp198.211.642.151,46.

7.5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang harus dipenuhi/diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp211.027.204.527,71 terdiri dari Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp144.172.310,00, Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp1.270.103.058,34, Utang Belanja sebesar Rp205.173.955.504,00 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp4.438.973.655,37.

Kewajiban Jangka Pendek selain Utang PFK dan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp209.612.929.159,37 terdiri dari:

1. Utang Belanja sebesar Rp205.173.955.504,00 dengan uraian sebagai berikut:
   a. Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp60.698.875.497,00; dan
   b. Utang Belanja selain Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp144.475.080.007,00 yang terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp2.301.534.175,00, Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp108.971.540.321,58, Utang Belanja Hibah sebesar Rp5.218.176.234,73, dan Utang Belanja Modal sebesar Rp27.983.829.275,69.
2. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp4.438.973.655,37.

Utang Belanja selain Bagi Hasil Pajak Daerah dan Utang Jangka Pendek Lainnya dengan total sebesar Rp148.914.053.662,37 (Rp144.475.080.007,00 + Rp4.438.973.655,37) merupakan utang yang timbul dari kegiatan belanja Perangkat Daerah yang hingga akhir tahun 2025 belum dapat dibayarkan karena keterbatasan kemampuan pendanaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Atas Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp209.612.929.159,37 tersebut, terdapat sisa kewajiban tahun 2024 sebesar Rp20.912.069.342,11 yang belum terselesaikan dan penambahan utang tahun 2025 sebesar Rp188.700.859.817,26, dengan rincian sebagai berikut:

1. Utang Belanja sebesar Rp205.173.955.504,00 terdiri dari sisa kewajiban tahun 2024 sebesar Rp17.445.619.145,61 dan penambahan utang tahun 2025 sebesar Rp187.728.336.358,39.
2. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp4.438.973.655,37 terdiri dari sisa kewajiban tahun 2024 sebesar Rp3.466.450.196,50 dan Utang tahun 2025 sebesar Rp972.523.458,87 yang berasal dari penyesuaian saldo awal atas utang tahun

sebelumnya sebesar Rp1.054.320.894,87 dikurangi realisasi pelunasan sebesar Rp81.797.436,00.

Rincian sisa kewajiban tahun 2024 dan penambahan utang 2025 atas Kewajiban Jangka Pendek pada Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya ditunjukkan **pada Lampiran 9**.

Penjelasan lebih rinci kewajiban jangka pendek sebagai berikut:

7.5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	144.172.310,00	**14.391.867,00**

Utang perhitungan fihak ketiga (PFK) merupakan utang yang timbul atas potongan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai akhir tahun. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp144.172.310,00. Selanjutnya dari total saldo utang tersebut, terdapat *outstanding* penyetoran pajak di akhir tahun 2025 sebesar Rp33.872.068,00 yang telah diproses oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah melalui penerbitan SP2D di tahun 2025 namun pengurangan nilai rekening Kas Daerah baru diproses oleh pihak perbankan pada tanggal 1 Januari 2026. Rincian Utang PFK dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.225 Rekapitulasi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

NO	SKPD	PPh21	PPh22	PPh23	PPh Ps 4 (2)	PPN	JUMLAH PFK 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(3+4+5+6+7)*
1	Dinas Pendidikan (BLUD) SMKN 2 Karimun	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2	Dinas Pendidikan (BLUD) SMKN 3 Batam	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3	Dinas Pendidikan (BLUD) SMKN 5 Batam	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4	Dinas Pendidikan (BLUD) SMKN 1 Bintan Timur	0,00	0,00	299.956,00	0,00	2.199.681,00	2.499.637,00
5	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Lingga Utara	162.000,00	0,00	912.100,00	0,00	16.816.939,00	17.891.039,00
6	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SLBN 1 Tanjungpinang	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SLBN 2 Tanjungpinang	60.000,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	69.920,00
8	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SLBN Batam	2.910.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	2.982.000,00
9	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SLBN Karimun	640.000,00	0,00	888.600,00	0,00	0,00	1.528.600,00
10	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SLBN Kundur	80.000,00	0,00	107.440,00	0,00	0,00	187.440,00
11	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Palmatak	115.000,00	0,00	94.500,00	0,00	5.062.326,00	5.271.826,00
12	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Tanjungpinang	337.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	352.500,00

NO	SKPD	PPh21	PPh22	PPh23	PPh Ps 4 (2)	PPN	JUMLAH PFK 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(3+4+5+6+7)*
13	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 2 Tanjungpinang	3.129.500,00	0,00	450.760,00	0,00	11.722.758,00	15.303.018,00
14	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Bintan Timur	2.624.280,00	0,00	1.042.368,00	0,00	0,00	3.666.648,00
15	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Bunguran Barat	0,00	0,00	740.200,00	0,00	10.212.054,00	10.952.254,00
16	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Mantang	0,00	0,00	0,00	0,00	316.443,00	316.443,00
17	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Pulau Tiga Barat	30.000,00	0,00	244.800,00	0,00	1.444.863,00	1.719.663,00
18	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Siantan Timur	115.000,00	0,00	94.500,00	0,00	5.062.326,00	5.271.826,00
19	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Singkep	0,00	0,00	2.202.800,00	0,00	21.033.388,00	23.236.188,00
20	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Singkep Selatan	1.035.000,00	0,00	733.680,00	0,00	0,00	1.768.680,00
21	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 1 Ungar	0,00	0,00	0,00	0,00	346.846,00	346.846,00
22	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 17 Batam	1.687.000,00	0,00	2.632.550,00	0,00	0,00	4.319.550,00
23	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 25 Batam	1.739.500,00	0,00	1.261.948,00	0,00	0,00	3.001.448,00
24	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 26 Batam	1.942.400,00	0,00	533.600,00	0,00	0,00	2.476.000,00
25	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 28 Batam	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
26	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 3 Kundur	870.000,00	0,00	762.485,00	0,00	2.544.732,00	4.177.217,00
27	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMAN 8 Batam	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
28	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMKN 1 Batam	0,00	0,00	1.014.529,00	0,00	0,00	1.014.529,00
29	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMKN 1 SKL	615.000,00	0,00	205.920,00	0,00	0,00	820.920,00
30	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMKN 2 Batam	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
31	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMKN 7 Batam	100.000,00	0,00	115.300,00	0,00	0,00	215.300,00
32	Dinas Pendidikan (Dana BOSP) SMKN Kundur Utara	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
33	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (BLUD)	0,00	314.250,00	0,00	0,00	0,00	314.250,00
34	Badan Pendapatan Daerah	0,00	314.864,00	0,00	0,00	2.309.009,00	2.623.873,00
35	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	3.494.400,00	0,00	19.219.200,00	22.713.600,00
36	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	188.262,00	591.681,00	779.943,00
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	540.870,00	0,00	0,00	3.966.380,00	4.507.250,00
38	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	0,00	389.712,00	0,00	0,00	2.857.690,00	3.247.402,00
	JUMLAH	**18.354.680,00**	**1.559.696,00**	**18.363.356,00**	**188.262,00**	**105.706.316,00**	**144.172.310,00**

7.5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	1.270.103.058,34	**0,00**

Pendapatan Diterima Dimuka digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah.

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat transaksi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp1.270.103.058,34 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.226 Rekapitulasi Pendapatan Diterima Dimuka OPD per 31 Desember 2025

No	Jenis Pendapatan Diterima Dimuka	Jumlah
1	**Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III**	**900.368.250,00**
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	900.368.250,00
2	**Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja**	**121.360.441,67**
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	121.360.441,67
3	**Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi**	**116.666.666,67**
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	116.666.666,67
4	**Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya**	**131.707.700,00**
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	37.510.000,00
	Badan Pendapatan Daerah	27.600.000,00
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	66.597.700,00
	Total	**1.270.103.058,34**

Adapun rincian Pendapatan Diterima Dimuka dijelaskan pada **Lampiran 8.**

7.5.3.2.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	205.173.955.504,00	**451.420.582.417,31**

Utang Belanja digunakan untuk mencatat utang belanja pemerintah daerah kepada pihak ketiga/masyarakat yang disebabkan terjadinya transaksi belanja yang belum dibayarkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Utang belanja sebesar Rp205.173.955.504,00 yang terdiri dari Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp60.698.875.497,00 yang dicatat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 258 Tahun 2026 tentang Besaran Tunda Salur dan Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025. Sedangkan Utang pihak ketiga terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp2.301.534.175,00, Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp108.971.540.321,58, Utang Belanja Hibah sebesar Rp5.218.176.234,73, dan Utang Belanja Modal sebesar Rp27.983.829.275,69.

Utang Belanja sebesar Rp205.173.955.504,00 terdiri dari sisa kewajiban tahun 2024 yang belum terselesaikan sebesar Rp17.445.619.145,61 dan penambahan Utang Belanja di tahun 2025 sebesar Rp187.728.336.358,39. Penyebab belum terselesaikan kewajiban di tahun 2024 dikarenakan beberapa kendala administratif antara lain:

1. Pada Dinas Pendidikan, masih terdapat penyedia yang belum mengajukan permohonan pembayaran dikarenakan ketidaksesuaian nilai hasil reviu dengan yang ditagihkan oleh pihak ketiga, dan masih ada nilai kewajiban yang masih dalam tahap proses reviu Inspektorat/APIP.
2. Pembayaran kewajiban pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud khususnya pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum dapat dibayarkan disebabkan belum dapat dianggarkan ke dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2025 dikarenakan ketersediaan kas yang belum memadai.
3. Belum terselesaikannya kewajiban pada Dinas Perumahan dan Permukiman disebabkan oleh keberadaan pihak ketiga yang tidak dapat ditelusuri sehingga belum ada pengajuan permohonan pembayaran.
4. Kewajiban pada Sekretariat DPRD merupakan utang belanja kepada PT. Telkom yang terbentuk sejak tahun 2017 dan belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran. Meskipun upaya konfirmasi aktif telah dilaksanakan secara berkala melalui penyampaian surat resmi maupun kunjungan langsung, pihak PT. Telkom belum memberikan tanggapan ataupun penjelasan formal baik secara tertulis maupun lisan terkait penyelesaian hak tagih dimaksud.

Dari total saldo penambahan Utang Belanja di tahun 2025 sebesar Rp187.728.336.358,39, terdapat saldo utang pada akun Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat sebesar Rp90.891.100,00 yang merupakan kewajiban atas dana Bantuan Biaya Personil Peserta Didik pada beberapa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri bersumber dari subkegiatan pada Dinas Pendidikan yang belum disalurkan per 31 Desember 2025 kepada penerima bantuan oleh sekolah. Adapun pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyediaan Biaya Personil Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kepulauan Riau dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 50 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan

Bantuan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Berikut ini adalah tabel rincian Utang Belanja:

Tabel 7.5.227 Rekapitulasi Utang Belanja per 31 Desember 2025

JENIS UTANG BELANJA	JUMLAH
Utang Belanja Pegawai	2.301.534.175,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	108.971.540.321,58
Utang Belanja Hibah	5.218.176.234,73
Utang Belanja Modal	27.983.829.275,69
Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	60.698.875.497,00
SALDO AKHIR UTANG BELANJA	**205.173.955.504,00**

Berikut ini adalah tabel mutasi utang belanja per 31 Desember 2025:

Tabel 7.5.228 Mutasi Utang Belanja Per 31 Desember 2025

MUTASI UTANG BELANJA						
Saldo Awal Utang Belanja, 1 Januari 2025						**451.420.582.417,31**
	Penambahan Utang Belanja Tahun 2025 :					
	1	**Penetapan Utang Belanja Pegawai**			**943.177.607,00**	
	-	-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib (BLUD)	943.177.607,00		
	-	-	-			
	2	**Penetapan Utang Belanja Barang dan Jasa**			**91.600.102.704,76**	
		-	Dinas Pendidikan	1.860.327.380,27		
		-	Dinas Kesehatan	1.600.223.747,00		
		-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	3.580.733.349,00		
		-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib (BLUD)	13.350.665.083,00		
		-	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (BLUD)	7.528.529.224,00		
		-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	15.894.691.410,20		
		-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	29.860.203.593,09		
		-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	283.240.123,00		
		-	Dinas Sosial	120.080.000,00		
		-	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	265.082.229,00		
		-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	350.786.590,00		
		-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	2.584.492.001,00		
		-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	53.893.500,00		

MUTASI UTANG BELANJA						
		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	52.000.000,00		
		-	Dinas Perhubungan	1.127.524.769,20		
		-	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.119.212.130,00		
		-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.121.027.548,00		
		-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.189.581.001,00		
		-	Dinas Kebudayaan	120.208.560,00		
		-	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	171.318.954,00		
		-	Dinas Kelautan dan Perikanan	129.562.340,00		
		-	Dinas Pariwisata	1.831.753.784,00		
		-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	427.425.540,00		
		-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	186.000.000,00		
		-	Biro Umum	1.531.291.686,00		
		-	Sekretariat DPRD	938.185.392,00		
		-	Badan Pendapatan Daerah	545.013.558,00		
		-	Badan Penghubung Daerah	519.709.213,00		
		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	257.340.000,00		
	3	**Penetapan Utang Belanja Hibah**			**5.374.500.325,33**	
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	3.128.621.397,33		
			Dinas Kelautan dan Perikanan	273.178.928,00		
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.972.700.000,00		
	4	**Penetapan Utang Belanja Modal**			**28.017.118.810,98**	
		-	Dinas Pendidikan	8.219.760.447,79		
		-	Dinas Kesehatan	49.950.000,00		
		-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	250.971.000,00		
		-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	6.822.103.863,96		
		-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	928.221.553,00		
		-	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	110.115.108,00		
		-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	157.264.800,00		
		-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	116.422.350,00		
		-	Dinas Perhubungan	2.810.850.831,23		
		-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	97.435.800,00		
		-	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	33.189.000,00		
		-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.195.606.800,00		
		-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	70.815.000,00		
		-	Biro Umum	138.500.000,00		
		-	Sekretariat DPRD	298.853.625,00		
		-	Badan Pendapatan Daerah	552.058.630,00		

MUTASI UTANG BELANJA						
		-	Inspektorat	83.400.001,00		
		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	81.600.001,00		
	5	**Koreksi Kurang Catat Pengakuan Utang Belanja Pegawai**			**1.358.356.568,00**	
		-	Dinas Pendidikan	1.358.356.568,00		
	6	**Koreksi Kurang Catat Pengakuan Utang Belanja Barang dan Jasa**			**91.817.100,00**	
		-	Dinas Pendidikan	90.891.100,00		
		-	Dinas Kesehatan	926.000,00		
	7	**Penambahan Utang Belanja Bagi Hasil**			**60.698.875.497,00**	
		-	Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	60.698.875.497,00		
	Total Penambahan :					**188.083.948.613,07**
	Pengurangan Utang Tahun 2025 :					
	1	**Pengurangan Utang Belanja Pegawai Tahun 2024 karena Pelunasan :**			**188.239.845,00**	
		-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	25.091.881,00		
	-	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	42.374,00		
	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	162.944.705,00		
	-	-	Dinas Kebudayaan	160.504,00		
	-	-	Badan Penghubung	381,00		
	-	-	-			
	2	**Pengurangan Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 karena Pelunasan :**			**170.070.535.150,96**	
		-	Dinas Pendidikan	5.794.977.764,52		
		-	Dinas Kesehatan	1.038.082.979,00		
		-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	975.754.394,00		
		-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib (BLUD)	13.210.721.980,00		
		-	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	328.826.489,00		
		-	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (BLUD)	9.143.953.637,00		
		-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8.593.553.311,60		
		-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	96.068.230.333,50		
		-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	1.689.684.459,00		
		-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31.790.000,00		
		-	Dinas Sosial	663.061.666,00		
		-	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	184.395.000,00		
		-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.043.241.000,00		
		-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	7.372.648.847,50		
		-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.433.873.000,00		
		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	311.192.000,00		

MUTASI UTANG BELANJA						
		-	Dinas Perhubungan	90.754.034,00		
		-	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.206.924.700,00		
		-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.077.250.396,00		
		-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	219.051.000,00		
		-	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	224.403.290,40		
		-	Dinas Kelautan dan Perikanan	283.714.320,00		
		-	Dinas Pariwisata	1.067.794.500,00		
		-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5.667.472.068,44		
		-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	302.150.000,00		
		-	Biro Administrasi Pimpinan	143.835.000,00		
		-	Biro Hukum	234.707.100,00		
		-	Sekretariat DPRD	4.636.668.554,00		
		-	Badan Pendapatan Daerah	4.637.437.354,00		
		-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	178.900.000,00		
		-	Badan Penghubung Daerah	501.324.908,00		
		-	Inspektorat	325.245.265,00		
		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	388.915.800,00		
	3	**Pengurangan Utang Belanja Hibah Tahun 2025 karena Pelunasan :**			**13.811.458.307,29**	
		-	Dinas Kesehatan	975.821.560,00		
		-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	4.811.908.747,29		
		-	Dinas Perhubungan	924.800.000,00		
		-	Dinas Kelautan dan Perikanan	119.028.000,00		
		-	Biro Umum	4.487.200.000,00		
		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.492.700.000,00		
	4	**Pengurangan Utang Belanja Modal Tahun 2025 karena Pelunasan :**			**23.428.037.713,45**	
		-	Dinas Pendidikan	4.868.142.634,67		
		-	Dinas Kesehatan	320.438.490,00		
		-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	342.192.000,00		
		-	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	536.550.000,00		
		-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.277.953.030,00		
		-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.196.107.660,00		
		-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	336.100.100,00		
		-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.700.000,00		
		-	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	277.685.000,00		
		-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22.140.000,00		
		-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	613.025.000,00		
		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.576.000,00		
		-	Dinas Perhubungan	1.900.641.377,29		
		-	Dinas Komunikasi dan Informatika	79.650.000,00		

MUTASI UTANG BELANJA						
		-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.800.000,00		
		-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	16.430.000,00		
		-	Dinas Kelautan dan Perikanan	80.450.000,00		
		-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	6.106.961.421,49		
		-	Biro Administrasi Pimpinan	12.045.000,00		
		-	Biro Kesejahteraan Rakyat	34.410.000,00		
		-	Biro Umum	1.113.100.000,00		
		-	Sekretariat DPRD	2.923.250.000,00		
		-	Badan Pendapatan Daerah	681.690.000,00		
		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	642.000.000,00		
	5	**Pengurangan Utang Belanja Barang dan Jasa Karena Koreksi :**			**94.383.615,09**	
		-	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib (BLUD)	900.000,00		
		-	Dinas Pekerjaan Umum	64.124.260,00		
		-	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	29.359.355,09		
	6	**Pengurangan Utang Belanja Hibah Karena Koreksi :**			**156.324.090,60**	
		-	Dinas Pekerjaan Umum	156.324.090,60		
	7	**Pengurangan Utang Belanja Modal Karena Koreksi :**			**104.904.548,99**	
		-	Dinas Pendidikan	104.904.548,99		
	8	**Pengurangan Belanja Bagi Hasil Tahun 2024 karena Pelunasan :**			**226.476.692.255,00**	
		-	Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	226.476.692.255,00		
	Total Pengurangan					**434.330.575.526,38**
Saldo Akhir Utang Belanja, 31 Desember 2025						**205.173.955.504,00**

Berikut rincian utang belanja pada beberapa OPD:

Tabel 7.5.229 Utang Belanja Pegawai

NO	PERANGKAT DAERAH	UTANG BELANJA PEGAWAI
1	*2*	*3*
1	Dinas Pendidikan	1.358.356.568,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib (BLUD)	943.177.607,00
	JUMLAH	**2.301.534.175,00**

Tabel 7.5.230 Utang Belanja Barang dan Jasa

NO	PERANGKAT DAERAH	UTANG BELANJA BARANG DAN JASA
1	*2*	*3*
1	Dinas Pendidikan	1.971.929.080,27
2	Dinas Kesehatan	1.601.149.747,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	3.580.733.349,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib (BLUD)	29.343.296.881,00
5	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (BLUD)	7.808.260.424,00
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	15.830.567.150,20
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	30.371.929.371,91
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	283.240.123,00
9	Dinas Sosial	120.080.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	265.082.229,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	350.786.590,00
12	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	2.584.492.001,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	53.893.500,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	52.000.000,00
15	Dinas Perhubungan	1.127.524.769,20
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.119.212.130,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.121.027.548,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.189.581.001,00
19	Dinas Kebudayaan	120.208.560,00
20	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	171.318.954,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	129.562.340,00
22	Dinas Pariwisata	1.831.753.784,00
23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	427.425.540,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	186.000.000,00
25	Biro Umum	1.531.291.686,00
26	Sekretariat DPRD	1.477.130.792,00
27	Badan Pendapatan Daerah	545.013.558,00
28	Badan Penghubung Daerah	519.709.213,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	257.340.000,00
	JUMLAH	**108.971.540.321,58**

Tabel 7.5.231 Utang Belanja Hibah

NO	PERANGKAT DAERAH	UTANG BELANJA HIBAH
1	*2*	*3*
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.972.297.306,73
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	273.178.928,00

NO	PERANGKAT DAERAH	UTANG BELANJA HIBAH
1	*2*	*3*
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.972.700.000,00
	JUMLAH	**5.218.176.234,73**

Tabel 7.5.232 Utang Belanja Modal

NO	PERANGKAT DAERAH	UTANG BELANJA MODAL
1	*2*	*3*
1	Dinas Pendidikan	8.150.178.100,00
2	Dinas Kesehatan	49.950.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	250.971.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	6.822.103.863,96
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	964.514.365,50
6	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	110.115.108,00
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	157.264.800,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	116.422.350,00
9	Dinas Perhubungan	2.810.850.831,23
10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	97.435.800,00
11	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	33.189.000,00
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.195.606.800,00
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	70.815.000,00
14	Biro Umum	138.500.000,00
15	Sekretariat DPRD	298.853.625,00
16	Badan Pendapatan Daerah	552.058.630,00
17	Inspektorat	83.400.001,00
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	81.600.001,00
	JUMLAH	**27.983.829.275,69**

Utang Belanja Rumah Sakit sebagaimana tabel-tabel di atas dirinci sebagai berikut:

1. Total Utang Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp34.118.178.837,00, terdiri dari:

a. Utang Belanja dari alokasi sumber dana BLUD sebesar Rp30.286.474.488,00 yang terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp943.177.607,00; dan Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp29.343.296.881,00.
b. Utang Belanja dari alokasi sumber dana APBD sebesar Rp3.831.704.349,00 yang terdiri dari Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3.580.733.349,00 dan Utang Belanja Modal sebesar Rp250.971.000,00.

2. Total Utang Belanja Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp7.808.260.424,00 merupakan Utang Belanja Barang dan Jasa dari alokasi sumber dana BLUD.

Tabel 7.5.233 Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

NO	KAB/KOTA	PKB	BBN-KB	AIR PERMUKAAN	PBB-KB	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Kota Batam	2.476.652.998,00	1.551.243.580,00	3.626.269.490,00	23.646.070.247,00	31.300.236.315,00
2	Kota Tanjung Pinang	519.164.274,00	251.330.380,00	(448.702.649,00)	6.127.564.509,00	6.449.356.514,00
3	Kab. Bintan	395.732.700,00	249.301.928,00	(633.292.717,00)	5.018.371.517,00	5.030.113.428,00
4	Kab. Karimun	486.838.561,00	220.510.478,00	16.512.207,00	5.052.209.987,00	5.776.071.233,00
5	Kab. Natuna	356.608.449,00	225.437.528,00	18.556.191,00	4.042.674.194,00	4.643.276.362,00
6	Kab. Lingga	346.976.854,00	208.297.178,00	48.711.809,00	3.168.618.088,00	3.772.603.929,00
7	Kab. Kep. Anambas	352.187.531,00	210.039.429,00	192.094.835,00	2.972.895.921,00	3.727.217.716,00
	TOTAL	**4.934.161.367,00**	**2.916.160.501,00**	**2.820.149.166,00**	**50.028.404.463,00**	**60.698.875.497,00**

7.5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	4.438.973.655,37	**3.466.450.196,50**

Utang Jangka Pendek Lainnya digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

Pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat utang jangka pendek lainnya sebesar Rp4.438.973.655,37 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.234 Rekapitulasi Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2025

NO	JENIS UTANG JANGKA PENDEK	JUMLAH
1	*2*	*3*
1	Utang Lebih Bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	2.674.623.655,37
2	Utang Kurang salur atas BOS Dikmen 2017	1.764.350.000,00
	Total Utang Jangka Pendek Lainnya	**4.438.973.655,37**

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Saldo Utang Lebih Bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.674.623.655,37

merupakan sisa kewajiban jangka pendek yang bersumber dari ketidaksesuaian nilai penetapan PKB dan BBN-KB pada tahun 2013 dengan nilai saldo awal utang sebesar Rp10.816.152.163,13. Sisa saldo utang sampai dengan saat ini merupakan hasil dari realisasi penyelesaian hak Wajib Pajak secara bertahap dimulai sejak tahun 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 321/SK/BP2RD/IV/2021 tentang Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.235 Rekapitulasi Utang Lebih Bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Per 31 Desember 2025

Tahun	Saldo Awal	Penyesuaian Saldo Awal	Pelunasan	Saldo Akhir
2013	10.816.152.163,13	0,00	0,00	10.816.152.163,13
2021	10.816.152.163,13	0,00	2.359.661.339,63	8.456.490.823,50
2022	8.456.490.823,50	0,00	1.741.910.548,00	6.714.580.275,50
2023	6.714.580.275,50	0,00	372.428.197,50	6.342.152.078,00
2024	6.342.152.078,00	0,00	4.640.051.881,50	1.702.100.196,50
2025	1.702.100.196,50	1.054.320.894,87	81.797.436,00	2.674.623.655,37

2. Saldo Utang kurang salur Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Menengah (Dikmen) per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp1.764.350.000,00. Saldo ini berasal dari kurang salur Dana Bos Jenjang SMA dan SMK Triwulan IV tahun 2016 dengan nilai saldo awal sebesar Rp3.658.900.000,00. Atas kewajiban tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengupayakan pengajuan pencairan dana Cadangan (*buffer*) kepada Tim BOS Pusat pada tahun 2017 untuk pembayaran kurang salur tersebut. Namun, dikarenakan keterbatasan alokasi dana Cadangan Pusat sehingga kurang salur BOS Dikmen tersebut hanya dapat direalisasikan pembayarannya ke sekolah sebesar Rp1.894.550.000,00 melalui SP2D Nomor 182/SP2D/4.04.06.02/2017 tanggal 8 Maret 2017. Dengan demikian, saldo utang atas kurang catat BOS Dikmen menjadi sebesar Rp1.764.350.000,00 (Rp3.658.900.000-Rp1.894.550.000,00). Sejak tahun 2017 sampai dengan 31 Desember 2025, tidak terdapat lagi realisasi pembayaran maupun alokasi anggaran tambahan dari Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan sisa kurang salur ini.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya ditunjukkan pada **Lampiran 9.**

7.5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

7.5.3.2.2.1 Utang Kepada Pemerintah Pusat

Utang Kepada Pemerintah Pusat	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	198.211.642.151,46	**196.353.186.257,62**

Utang Kepada Pemerintah Pusat adalah Utang Jangka Panjang atas jaminan pascatambang dan jaminan reklamasi yang merupakan jaminan yang digunakan Gubernur untuk menunjuk pihak ketiga jika nantinya perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan komitmennya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 169C huruf c terdapat peralihan kewenangan atas dana jaminan reklamasi dan pascatambang dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ke Pemerintah Pusat.

Nilai Kewajiban Jangka Panjang untuk Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada tahun 2025 sebesar Rp198.211.642.151,46 terdiri atas jaminan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 7.5.236 Dana Jaminan Reklamasi dan Dana Jaminan Pascatambang

KABUPATEN/KOTA	REKLAMASI	PASCATAMBANG	TOTAL
KABUPATEN BINTAN	2.624.410.605,94	61.604.742.928,18	64.229.153.534,12
KOTA TANJUNGPINANG	309.326.052,00	4.349.382.686,00	4.658.708.738,00
KABUPATEN LINGGA	5.972.150.907,17	9.648.828.025,80	15.620.978.932,97
KABUPATEN KARIMUN	29.814.896.705,42	78.024.114.411,23	107.839.011.116,65
KOTA BATAM	2.253.678.010,00	1.548.334.148,00	3.802.012.158,00
KABUPATEN NATUNA	2.027.496.097,72	34.281.574,00	2.061.777.671,72
JUMLAH	**43.001.958.378,25**	**155.209.683.773,21**	**198.211.642.151,46**

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.237 Rincian Dana Jaminan Reklamasi dan Dana Jaminan Pascatambang

DANA JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG TAHUN 2025						
Saldo Awal Dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, 1 Januari 2025						**196.353.186.257,62**
	Penambahan :					
	1	**Penempatan dan Penambahan Bunga Deposito dan Koreksi Pencatatan Dana Jaminan Reklamasi**			626.020.566,62	
			Kabupaten Bintan	57.260.078,49		
			Kota Tanjungpinang	276.750,00		
			Kabupaten Lingga	103.502.497,44		
			Kota Batam	25.260.127,00		
			Kabupaten Karimun	438.507.423,63		
			Kabupaten Natuna	1.213.690,06		
	2	**Penempatan dan Penambahan Bunga Deposito, dan Koreksi Pencatatan Dana Jaminan Pascatambang**			6.563.954.523,02	
			Kabupaten Bintan	1.161.825.579,53		
			Kota Tanjungpinang	28.292.828,00		
			Kabupaten Lingga	197.595.758,67		
			Kota Batam	19.686.084,00		
			Kabupaten Karimun	5.156.554.272,82		
			Kabupaten Natuna	0,00		

DANA JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG TAHUN 2025			
Total Penambahan :			**7.189.975.089,64**
Pengurangan :			
1 Pencairan dan Koreksi Pencatatan Dana Jaminan Reklamasi		1.222.324.026,61	
Kabupaten Karimun	1.222.324.026,61		
2 Pencairan dan Koreksi Pencatatan Dana Jaminan Pascatambang		4.109.195.169,19	
Kabupaten Bintan	63.747,00		
Kabupaten Karimun	4.109.131.422,19		
Total Pengurangan :			**5.331.519.195,80**
Saldo Akhir Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, 31 Desember 2025			**198.211.642.151,46**

Nilai Kewajiban Jangka Panjang untuk Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp198.211.642.151,46 tersebut merupakan nilai Jaminan Reklamasi dan Pascatambang yang ditempatkan atas nama Gubernur/Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Jaminan Reklamasi dan Pascatambang disajikan sebagai akun Kewajiban Jangka Panjang - Utang Kepada Pemerintah Pusat dikarenakan tidak ada akun yang relevan dapat mengakomodir penyajian jaminan tersebut dalam bagan akun standar aplikasi pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Berikut ini tabel nilai penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang Atas Nama Gubernur/Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 7.5.238 Dana Jaminan Reklamasi & Pascatambang Atas Nama Gubernur/Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
KABUPATEN BINTAN							
1	PT. BINA RIAU JAYA				7.000.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINA RIAU JAYA	BNI
					5.568.842.847,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINA RIAU JAYA	BNI
					3.588.895.711,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINA RIAU JAYA	BNI
2	PT. BINTAN INTI SUKSES				599.364.471,46	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTAN INTI SUKSES	BTN
3	PT. BINTAN KARISMA PRATAMA				870.197.396,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTAN KARISMA PRATAMA	BRI
4	PT. BINTAN NUSA MULTI	67.008.938,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTAN NUSA MULTI	BNI	3.226.625.878,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTAN NUSA MULTI	BNI
5	PT. BINTANG MAHKOTA SUKSES	1.122.200.707,10	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTANG MAHKOTA SUKSES	BANK MANDIRI	6.000.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTANG MAHKOTA SUKSES	BANK MANDIRI
					1.086.348.322,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTANG MAHKOTA SUKSES	BANK MANDIRI
					7.383.551.981,72	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BINTANG MAHKOTA SUKSES	BANK MANDIRI
6	PT. BUKIT PANGLONG				278.042.813,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. BUKIT PANGLONG	BPR BINTAN
7	PT. GUNUNG BINTAN ABADI				6.098.737.418,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. GUNUNG BINTAN ABADI	BPR BINTAN
8	PT. GUNUNG MARIO LAGALIGO	319.545.601,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. GUNUNG MARIO LAGALIGO	BNI	1.292.509.743,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. GUNUNG MARIO LAGALIGO	BNI
9	PT. LOBINDO NUSA PERSADA				3.160.321.432,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. LOBINDO NUSA PERSADA	BANK MANDIRI
10	PT. SHANINDO INDAH				33.623.715,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. SHANINDO INDAH	BPR BINTAN

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
11	PT. SINDO MANDIRI				841.350.708,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. SINDO MANDIRI	BPR BINTAN
12	PT. TRI PANORAMA SETIA				4.523.991.411,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. TRI PANORAMA SETIA	BNI
13	PT. TRI PANORAMA SETIA	1.115.655.359,84	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. TRI PANORAMA SETIA	BANK MANDIRI			
14	PT. TUNGGUL ULUNG MAKMUR				4.568.420.006,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. TUNGGUL ULUNG MAKMUR	BPR BINTAN
15	PT. WAHANA KARYA SUKSESINDO UTAMA				5.483.919.075,00	GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU QQ PT. WAHANA KARYA SUKSESINDO UTAMA	BRI
TOTAL BINTAN		**2.624.410.605,94**			**61.604.742.928,18**		
							KOTA TANJUNGPINANG
1	PT. ALAM INDAH PURNAMA PANJANG					DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA QQ PT. ALAM INDAH PURNAMA PANJANG	
						DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA QQ PT. ALAM INDAH PURNAMA PANJANG	
2	PT. KERETA KENCANA BANGUN PERKASA	309.326.052,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. KERETA KENCANA	BPR BESTARI	3.994.200.784,00	GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU QQ PT. KERETA KENCANA BANGUN PERKASA	BPR BESTARI
3	PT. SYAHNUR				355.181.902,00	KA. DPMPTSP PROV. KEPRI PT. SYAHNUR (SYAHJONI)	BPR BESTARI
TOTAL TANJUNGPINANG		**309.326.052,00**			**4.349.382.686,00**		
							KABUPATEN LINGGA
1	PT. ALAM PURNAMA PANJANG	583.116.514,92	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ALAM PURNAMA PANJANG	BANK MANDIRI	664.117.520,62	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ALAM PURNAMA PANJANG	BANK MANDIRI

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
2	PT. BINTAN BATAM PRATAMA				827.515.088,00	KEPALA DPMPTSP PROVINSI KEPRI QQ PT BINTAN BATAM PRATAMA	BNI
3	PT. BUKIT ALAM INDO	446.542.068,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUKIT ALAM INDO	BRI	441.984.440,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUKIT ALAM INDO	BRI
4	PT. CITRA SEMARAK SEJATI	86.148.796,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. CITRA SEMARAK SEJATI	BNI	742.588.493,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. CITRA SEMARAK SEJATI	BNI
5	PT. DABO BANGUN SUKSES	613.749.480,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. DABO BANGUN SUKSES	BTN	722.655.993,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. DABO BANGUN SUKSES	BTN
6	PT. DABO BINA SUKSES	830.020.430,23	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. DABO BINA SUKSES	BANK MANDIRI			
7	PT. DEVA PANJANG JAYA	739.491.234,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. DEVA PANJANG JAYA	BTN	477.301.354,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. DEVA PANJANG JAYA	BTN
8	PT. ENERGI SINGKEP BERTUAH	683.733.184,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ENERGI SINGKEP BERTUAH	BNI	530.591.095,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ENERGI SINGKEP BERTUAH	BNI
9	PT. GROWA INDONESIA	247.675.431,52	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. GROWA INDONESIA	BANK MANDIRI	728.542.053,41	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. GROWA INDONESIA	BANK MANDIRI
		178.189.989,65	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. GROWA INDONESIA	BANK MANDIRI	6.883.747,69	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. GROWA INDONESIA	BANK MANDIRI
		235.914.215,63	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. GROWA INDONESIA	BANK MANDIRI			
10	PT. INDO INTER INTRACO	244.066.856,22	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. INDO INTER INTRACO	BANK MANDIRI	122.033.428,08	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. INDO INTER INTRACO	BANK MANDIRI
					1.144.475.616,00	KA. DPMPTSP PROVINSI KEPRI QQ PT. INDO INTER INTRACO	BRI
11	PT. INDOPRIMA KARISMA JAYA	393.601.902,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. INDOPRIMA KARISMA JAYA	BRI	1.295.879.119,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. INDOPRIMA KARISMA JAYA	BRI
12	PT. MITRA PERSADA RESOURCES	0,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. MITRA PERSADA RESOURCES	BTN	0,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. MITRA PERSADA RESOURCES	BTN
					0,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. MITRA PERSADA RESOURCES	BTN

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
13	PT. SINGKEP TUAH PERSADA	566.342.976,00	KA. DPMPTSP PROVINSI KEPRI QQ PT. SINGKEP TUAH PERSADA	BRI	480.315.263,00	KA. DPMPTSP PROVINSI KEPRI QQ PT. SINGKEP TUAH PERSADA	BRI
14	PT. SIRTU ALAM PERSADA				1.463.944.815,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. SIRTU ALAM PERSADA	BNI
15	PT. TRI TUNAS UTAMA	123.557.829,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. TRI TUNAS UTAMA	BNI			
TOTAL LINGGA		**5.972.150.907,17**			**9.648.828.025,80**		
							KOTA BATAM
1	PT. BARELANG INTERNASIONAL EKSPASINDO	116.614.872,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ BARELANG INTERNASIONAL EKSPANSINDO	BNI	27.469.592,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ BARELANG INTERNASIONAL EKSPANSINDO	BNI
		270.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ BARELANG INTERNASIONAL EKSPANSINDO	BNI	134.380.707,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ BARELANG INTERNASIONAL EKSPANSINDO	BNI
		290.186.427,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ BARELANG INTERNASIONAL EKSPANSINDO	BNI			
2	PT. BINTANG ARTHA MAKMUR	150.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT BINTANG ARTHA MAKMUR	BNI	150.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT BINTANG ARTHA MAKMUR	BNI
		97.617.282,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT BINTANG ARTHA MAKMUR	BNI	207.135.208,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT BINTANG ARTHA MAKMUR	BNI
3	PT. BUMI SEMESTA UTAMA	150.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUMI SEMESTA UTAMA	BNI	150.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUMI SEMESTA UTAMA	BNI
		152.432.421,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUMI SEMESTA UTAMA	BNI	305.495.152,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUMI SEMESTA UTAMA	BNI

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
4	PT. CIPTA REZEKI KITA BERSAMA	0,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. CIPTA REZEKI KITA BERSAMA	BANK MANDIRI			
5	PT. RIAU MULIA JAYA	150.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. RIAU MULIA JAYA	BNI	150.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. RIAU MULIA JAYA	BNI
		65.415.100,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. RIAU MULIA JAYA	BNI	150.593.885,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. RIAU MULIA JAYA	BNI
6	PT. RIAU PRATAMA		KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. RIAU PRATAMA	BANK MANDIRI			
7	PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	403.469.336,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI	136.629.802,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI
8	PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	407.942.572,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI	136.629.802,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI
TOTAL BATAM		**2.253.678.010,00**		**-**	**1.548.334.148,00**		
KABUPATEN KARIMUN							
1	CV. BALI JAYA KARIMUN	80.917.046,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ CV. BALI JAYA KARIMUN	BNI	104.405.312,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ CV. BALI JAYA KARIMUN	BNI
2	PT. ANEKA ALAM ANUGERAH	109.804.391,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ANEKA ALAM ANUGERAH	BNI	500.000.000,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ANEKA ALAM ANUGERAH	BNI
					282.389.069,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ANEKA ALAM ANUGERAH	BNI
3	PT. ASA TATA MARDIVKA	771.546.220,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ASA TATA MARDIVKA	BNI	57.649.285,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ASA TATA MARDIVKA	BNI
		57.649.285,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ASA TATA MARDIVKA	BNI	356.980.428,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ASA TATA MARDIVKA	BNI
4	PT. ATMA BERSATU SUKSES	235.423.114,00	KEPALA DPMPTSP PROV KEPRI QQ DIR PT ATMA BERSATU SUKSES	BNI	136.597.365,00	KEPALA DPMPTSP PROV KEPRI QQ DIR PT ATMA BERSATU SUKSES	BNI
		197.428.627,00	KEPALA DPMPTSP PROV KEPRI QQ DIR PT ATMA BERSATU SUKSES	BNI			

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
5	PT. BERKAH MAJU BERSAMA	429.881.663,58	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BERKAH MAJU BERSAMA	BANK MANDIRI	61.411.666,20	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BERKAH MAJU BERSAMA	BANK MANDIRI
		11.613.691,97	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BERKAH MAJU BERSAMA	BANK MANDIRI	462.458.303,48	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BERKAH MAJU BERSAMA	BANK MANDIRI
6	PT. BUKIT ALAM PERSADA		GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. BUKIT ALAM PERSADA	BNI	10.263.240.431,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. BUKIT ALAM PERSADA	BNI
7	PT. BUKIT GRANIT MINING MANDIRI	3.193.546.469,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. BUKIT GRANIT MINING MANDIRI	BNI	784.013.128,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. BUKIT GRANIT MINING MANDIRI	BNI
8	PT. BUKIT LINTANG KARIMUN	0,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUKIT LINTANG KARIMUN	BANK MANDIRI	0,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. BUKIT LINTANG KARIMUN	BANK MANDIRI
9	PT. BUKIT MERAH INDAH	6.090.135.156,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT BUKIT MERAH INDAH	BNI	4.806.861.000,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT BUKIT MERAH INDAH	BNI
10	PT. CIPTA MORO MANDIRI	31.260.133,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT CIPTA MORO MANDIRI	BNI			
11	PT. CITRA SINDO	388.211.320,00	GUB. KEPRI CQ KA. PMPTSP KEPRI QQ PT. CITRA SINDO	BNI	464.350.000,00	GUB. KEPRI CQ KA. PMPTSP KEPRI QQ PT. CITRA SINDO	BNI
12	PT. ENERGI CAHAYA MAKMUR				383.356.245,82	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ENERGI CAHAYA MAKMUR	BANK MANDIRI
					373.772.054,73	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. ENERGI CAHAYA MAKMUR	BANK MANDIRI
13	PT. EUNINDO USAHA MANDIRI BLOK A	188.657.752,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT EUNINDO USAHA MANDIRI	BNI	68.346.050,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. EUNINDO USAHA MANDIRI	BNI CABANG TANJUNG BALAI KARIMUN
	PT. EUNINDO USAHA MANDIRI BLOK C				244.780.620,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. EUNINDO USAHA MANDIRI	BNI
	PT. EUNINDO USAHA MANDIRI BLOK D	207.329.223,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT EUNINDO USAHA MANDIRI	BNI		DIRJEN MINERBA QQ PT. EUNINDO USAHA MANDIRI	BNI

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
14	PT. INDONESIA BISA SUKSES	378.804.764,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT INDONESIA BISA SUKSES	BNI	124.198.255,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT INDONESIA BISA SUKSES	BNI
15	PT. JENI PRIMA SUKSES	1.469.669.061,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. JENI PRIMA SUKSES	BNI	690.060.033,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. JENI PRIMA SUKSES	BNI
16	PT. KARIMUN GRANIT	4.037.384.500,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. KARIMUN GRANITE	BRI	19.048.163.085,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. KARIMUN GRANITE	BRI
		645.517.715,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. KARIMUN GRANITE	BRI			
		314.032.800,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. KARIMUN GRANITE	BRI			
17	PT. KARIMUN MINING	211.288.799,26	KA. DINAS ESDM QQ PT. KARIMUN MINING	BANK MANDIRI		-	-
18	PT. KAWASAN DINAMIKA HARMONITAMA	4.444.811.000,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. KAWASAN DINAMIKA HARMONITAMA	BNI	970.297.000,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. KAWASAN DINAMIKA HARMONITAMA	BNI
19	PT. MIRASINDO PERDANA	0,00	GUB. KEPRI CQ KA. BPMPTSP KEPRI QQ PT. MIRASINDO PERDANA	BNI	0,00	GUB. KEPRI CQ KA. BPMPTSP KEPRI QQ PT. MIRASINDO PERDANA	BNI
					0,00	GUB. KEPRI CQ KA. BPMPTSP KEPRI QQ PT. MIRASINDO PERDANA	BNI
					0,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. MIRASINDO PERDANA	BANK MANDIRI
					3.256.095.591,00	KA. DINAS PMPTSP KEPRI QQ PT. MIRASINDO PERDANA	BRI Cab. Tg. Balai Karimun
20	PT. PERINTIS MORO ADITYA	1.562.609.315,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. PERINTIS MORO ADITYA	BNI	0,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT. PERINTIS MORO ADITYA	BNI
21	PT. RIAU ALAM ANUGERAH INDONESIA	0,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT RIAUALAM ANUGERAH INDONESIA	BNI	13.675.861.389,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT RIAUALAM ANUGERAH INDONESIA	BNI
		0,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT RIAUALAM ANUGERAH INDONESIA	BNI			

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
		0,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT RIAUALAM ANUGERAH INDONESIA	BNI			
		0,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT RIAUALAM ANUGERAH INDONESIA	BNI			
22	PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	420.211.644,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI	136.629.802,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI
23	PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	426.346.006,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI	136.629.802,00	KA. DPMPTSP KEPRI QQ PT. SARANA TRANS SEJAHTERA	BNI
24	PT. SINDO MANDIRI	34.339.084,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT SINDO MANDIRI	BNI		-	-
25	PT. SUNGAI UNGAR ABADI	220.962.985,61	KA. DINAS ESDM QQ PT. SUNGAI UNGAR ABADI	BANK MANDIRI	2.311.427,00	KA. DINAS ESDM QQ PT. SUNGAI UNGAR ABADI	BANK MANDIRI
26	PT. SYABAS RIAU SAKTI	60.345.395,00	GUBERNUR KEPUALAUAN RIAU QQ SYABAS RIAU SAKTI	BNI		-	-
27	PT. TANJUNG MELAYU MAKMUR	12.220.595,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT TANJUNG MELAYU MAKMUR	BNI		-	-
28	PT. WIRA PENTA KENCANA	0,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT WIRA PENTA KENCANA	BNI	10.025.509.314,00	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU QQ PT WIRA PENTA KENCANA	BRI
29	PT. PACIFIC GRANITAMA	3.582.948.950,00	DIRJEN MINERBA QQ. PACIFIC GRANITAMA	BNI	947.534.000,00	DIRJEN MINERBA QQ. PACIFIC GRANITAMA	BNI
					7.748.927.974,00	DIRJEN MINERBA QQ. PACIFIC GRANITAMA	BNI
					1.911.285.781,00	DIRJEN MINERBA QQ. PACIFIC GRANITAMA	BNI
TOTAL KARIMUN		**29.814.896.705,42**			**78.024.114.411,23**		
KABUPATEN NATUNA							
1	PT. MULTI MINERAL INDONESIA	774.478.743,00	KA. DINAS DPMPTSP PROV KEPRI QQ PT. MULTI MINERAL INDONESIA	BRI			

NO	PERUSAHAAN	JAMINAN REKLAMASI			JAMINAN PASCATAMBANG		
		2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN	2025	NAMA REKENING	BANK PENYIMPAN
2	PT. ZAMRUD EKUATOR RESOURCES	761.250.412,00	KA. DINAS DPMPTSP PROV KEPRI QQ PT. ZAMRUD EKUATOR RESOURCES	BANK MANDIRI			
3	PT. INDOPRIMA KARISMA JAYA	246.308.690,00	KA. DINAS DPMPTSP PROV KEPRI QQ PT. INDOPRIMA KARISMA JAYA	BRI	34.281.574,00	KA. DINAS DPMPTSP PROV KEPRI QQ PT. INDOPRIMA KARISMA JAYA	BRI
4	CV. NUSANTARA PASIR NATUNA	245.458.252,72	KA. DINAS DPMPTSP PROV KEPRI QQ CV. NUSANTARA PASIR NATUNA	BANK MANDIRI		-	-
TOTAL NATUNA		**2.027.496.097,72**			**34.281.574,00**		
GRAND TOTAL		**43.001.958.378,25**			**155.209.683.773,21**		

7.5.3.3. Ekuitas

Ekuitas	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	6.405.952.705.462,58	**6.454.280.263.239,55**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pada Tahun 2025 Ekuitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar Rp6.405.952.705.462,58.

- Ekuitas Awal	6.454.280.263.239,55
- Surplus / (Defisit) - LO	(72.434.959.518,69)
- Koreksi Nilai Persediaan	18.786.477,00
- Lain-lain	24.088.615.264,72
Ekuitas Akhir	6.405.952.705.462,58

7.5.4. Penjelasan Pos – Pos Laporan Operasional (LO)

7.5.4.1. Pendapatan–LO

Pendapatan - LO	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	3.821.021.620.282,91	**4.115.268.949.417,46**

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Pendapatan-LO sebesar Rp3.821.021.620.282,91 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.239 Pendapatan–LO

Jenis Pendapatan – LO	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	1.625.803.703.863,68	1.994.646.518.322,80
Pendapatan Transfer - LO	1.971.160.493.024,00	1.949.654.986.207,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO	224.057.423.395,23	170.967.444.887,66
JUMLAH	**3.821.021.620.282,91**	**4.115.268.949.417,46**

7.5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah - LO	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	1.625.803.703.863,68	**1.994.646.518.322,80**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah - LO, Pendapatan Retribusi Daerah - LO, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO, dan Lain-lain PAD yang Sah – LO, rincian Pendapatan Asli Daerah - LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 7.5.240 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Jenis Pendapatan Asli Daerah - LO	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
Pajak Daerah - LO	1.362.886.776.941,50	1.787.142.204.747,00
Retribusi Daerah - LO	163.297.061.511,33	155.726.470.273,30
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	2.275.536.541,00	1.904.909.335,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	97.344.328.869,85	49.872.933.967,50
JUMLAH	**1.625.803.703.863,68**	**1.994.646.518.322,80**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp368.842.814.459,12 atau sebesar 18,49% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.994.646.518.322,80 yang dipengaruhi beberapa hal berikut ini:

1. Penurunan realisasi pada Pajak Daerah - LO dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Undang-Undang HKPD) terkait ketentuan Opsen Pajak Daerah yang berlaku mulai 5 Januari 2025. Sebelumnya, pada tahun 2024 Penerimaan PKB dan BBNKB dicatat 100% sebagai pendapatan Pajak Daerah yang dicatat di kas daerah Provinsi terlebih dahulu, kemudian disalurkan ke Kabupaten/Kota melalui mekanisme Bagi Hasil. Sedangkan pada tahun 2025 tarif dasar PKB dan BBNKB untuk provinsi diturunkan, dan porsi untuk Kabupaten/Kota ditarik langsung sebagai Opsen yang langsung masuk ke kas Kabupaten/Kota.
2. Sedangkan kenaikan realisasi Retribusi Daerah – LO dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perluasan kerja sama pemanfaatan ruang perairan dengan pihak swasta, serta tingginya volume permintaan layanan teknis pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
3. Selanjutnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO juga mengalami peningkatan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya kenaikan komposisi pembagian dividen atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) yang membukukan

pertumbuhan laba bersih pada tahun buku berkenaan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024.

4. Disamping itu juga peningkatan realisasi Lain-lain PAD Yang Sah - LO dibandingkan tahun sebelumnya didorong oleh pengembalian sisa penggunaan dana hibah Pilkada serentak tahun 2024 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau.

Apabila dibandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 7.5.241 Rincian Selisih Pendapatan Asli Daerah (PAD) LRA dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) LO

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	LAPORAN OPERASIONAL	SELISIH
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**1.736.336.133.204,89**	**1.625.803.703.863,68**	**(110.532.429.341,21)**
Pajak Daerah-LO	**1.447.285.058.158,50**	**1.362.886.776.941,50**	**(84.398.281.217,00)**
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	405.307.682.591,00	403.538.708.091,00	(1.768.974.500,00)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO	273.480.737.600,00	262.307.303.900,00	(11.173.433.700,00)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	489.750.163.677,00	450.061.566.595,00	(39.688.597.082,00)
Pajak Air Permukaan-LO	33.017.182.076,00	1.249.906.141,00	(31.767.275.935,00)
Pajak Rokok–LO	174.288.290.965,00	174.288.290.965,00	0,00
Pajak Alat Berat-LO	614.336.352,00	614.336.352,00	0,00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	70.826.664.897,50	70.826.664.897,50	0,00
Retribusi Daerah-LO	**171.517.367.082,00**	**163.297.061.511,33**	**(8.220.305.570,67)**
Retribusi Jasa Umum-LO	164.145.264.443,00	157.135.930.336,00	(7.009.334.107,00)
Retribusi Jasa Usaha-LO	5.950.969.639,00	5.640.366.425,33	(310.603.213,67)
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	1.421.133.000,00	520.764.750,00	(900.368.250,00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	**2.275.536.541,00**	**2.275.536.541,00**	**0,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	2.275.536.541,00	2.275.536.541,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	**115.258.171.423,39**	**97.344.328.869,85**	**(17.913.842.553,54)**
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	512.084.414,00	512.084.414,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	957.027.354,47	765.854.412,60	(191.172.941,87)
Jasa Giro-LO	3.616.972.805,65	3.616.972.805,65	0,00
Pendapatan Bunga-LO	1.889.238.643,57	1.889.238.643,57	0,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	163.611,88	163.611,88	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	80.794.464,06	175.021.842,90	94.227.378,84
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	25.858.479.507,12	10.071.577.274,00	(15.786.902.233,12)
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	35.861.416,00	36.300.594,00	439.178,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian-LO	76.974.438.969,96	74.939.462.090,57	(2.034.976.879,39)
Pendapatan dari BLUD-LO	5.227.554.179,52	5.233.097.123,52	5.542.944,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	4.107.657,16	4.107.657,16	0,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	100.448.400,00	100.448.400,00	0,00

Penjelasan selisih Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.242 Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah-LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PELUNASAN SALDO AWAL PIUTANG	PELUNASAN PIUTANG	PENETAPAN PIUTANG 2025	LAPORAN OPERASIONAL
Pajak Daerah-LO	**1.447.285.058.158,50**	**(85.158.832.017,00)**	**(1.141.835.397.671,00)**	**1.142.595.948.471,00**	**1.362.886.776.941,50**
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	**405.307.682.591,00**	**(1.873.829.000,00)**	**(419.612.874.573,00)**	**419.717.729.073,00**	**403.538.708.091,00**
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO	9.139.165.550,00	(1.873.829.000,00)	(419.612.874.573,00)	419.717.729.073,00	7.370.191.050,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	54.929.599.391,00	0,00	0,00	0,00	54.929.599.391,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	224.538.883.977,00	0,00	0,00	0,00	224.538.883.977,00
PKB-Mobil Bus-Microbus-LO	262.625.008,00	0,00	0,00	0,00	262.625.008,00
PKB-Mobil Bus-Bus-LO	2.842.714.059,00	0,00	0,00	0,00	2.842.714.059,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	12.908.463.294,00	0,00	0,00	0,00	12.908.463.294,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	9.160.009.032,00	0,00	0,00	0,00	9.160.009.032,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	11.572.695.951,00	0,00	0,00	0,00	11.572.695.951,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO	884.247.652,00	0,00	0,00	0,00	884.247.652,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua–LO	78.977.952.537,00	0,00	0,00	0,00	78.977.952.537,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga–LO	91.326.140,00	0,00	0,00	0,00	91.326.140,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO	**273.480.737.600,00**	**(11.829.130.000,00)**	**(270.285.402.600,00)**	**270.941.098.900,00**	**262.307.303.900,00**
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan -LO	3.971.040.400,00	0,00	0,00	0,00	3.971.040.400,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	30.316.626.800,00	0,00	0,00	0,00	30.316.626.800,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	137.745.131.100,00	(11.829.130.000,00)	(270.285.402.600,00)	270.941.098.900,00	126.571.697.400,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO	122.397.700,00	0,00	0,00	0,00	122.397.700,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus–LO	4.276.193.700,00	0,00	0,00	0,00	4.276.193.700,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	8.080.919.200,00	0,00	0,00	0,00	8.080.919.200,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	2.487.726.400,00	0,00	0,00	0,00	2.487.726.400,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	7.591.358.000,00	0,00	0,00	0,00	7.591.358.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO	610.246.200,00	0,00	0,00	0,00	610.246.200,00

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PELUNASAN SALDO AWAL PIUTANG	PELUNASAN PIUTANG	PENETAPAN PIUTANG 2025	LAPORAN OPERASIONAL
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	78.084.468.000,00	0,00	0,00	0,00	78.084.468.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	194.630.100,00	0,00	0,00	0,00	194.630.100,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	**489.750.163.677,00**	**(39.688.597.082,00)**	**(450.061.566.595,00)**	**450.061.566.595,00**	**450.061.566.595,00**
PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO	282.523.757.628,00	(39.688.597.082,00)	(450.061.566.595,00)	450.061.566.595,00	242.835.160.546,00
PBBKB Bahan Bakar Solar–LO	207.226.406.049,00	0,00	0,00	0,00	207.226.406.049,00
Pajak Air Permukaan-LO	**33.017.182.076,00**	**(31.767.275.935,00)**	**(1.261.217.551,00)**	**1.261.217.551,00**	**1.249.906.141,00**
Pajak Air Permukaan-LO	33.017.182.076,00	(31.767.275.935,00)	(1.261.217.551,00)	1.261.217.551,00	1.249.906.141,00
Pajak Rokok–LO	**174.288.290.965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.288.290.965,00**
Pajak Rokok-LO	174.288.290.965,00	0,00	0,00	0,00	174.288.290.965,00
Pajak Alat Berat-LO	**614.336.352,00**	**0,00**	**(614.336.352,00)**	**614.336.352,00**	**614.336.352,00**
Pajak Alat Berat-LO	614.336.352,00	0,00	(614.336.352,00)	614.336.352,00	614.336.352,00
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	**70.826.664.897,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.826.664.897,50**
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	70.826.664.897,50	0,00	0,00	0,00	70.826.664.897,50

Tabel 7.5.243 Penjelasan Selisih Retribusi Daerah-LRA dengan Retribusi Daerah-LO

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PELUNASAN PIUTANG	PELUNASAN SALDO AWAL PIUTANG	PENETAPAN PIUTANG	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	KOREKSI LEBIH CATAT RETRIBUSI DAERAH-LO	LAPORAN OPERASIONAL
Retribusi Daerah-LO	**171.517.367.082,00**	**(144.871.964.763,00)**	**(8.547.428.357,00)**	**146.472.830.166,00**	**(1.148.742.616,67)**	**(125.000.000,00)**	**163.297.061.511,33**
Retribusi Jasa Umum-LO	**164.145.264.443,00**	**(144.681.930.263,00)**	**(8.523.674.357,00)**	**146.196.270.513,00**	**0,00**	**0,00**	**157.135.930.336,00**
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	**164.145.264.443,00**	**(144.681.930.263,00)**	**(8.523.674.357,00)**	**146.196.270.513,00**	**0,00**	**0,00**	**157.135.930.336,00**
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	164.145.264.443,00	(144.681.930.263,00)	(8.523.674.357,00)	146.196.270.513,00	0,00	0,00	157.135.930.336,00
Retribusi Jasa Usaha-LO	**5.950.969.639,00**	**(190.034.500,00)**	**(23.754.000,00)**	**276.559.653,00**	**(248.374.366,67)**	**(125.000.000,00)**	**5.640.366.425,33**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	**2.145.830.800,00**	**(150.616.800,00)**	**(23.754.000,00)**	**236.232.192,00**	**(248.374.366,67)**	**(125.000.000,00)**	**1.834.317.825,33**
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(116.666.666,67)	0,00	8.333.333,33
Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	1.545.830.800,00	(150.616.800,00)	(23.754.000,00)	236.232.192,00	(131.707.700,00)	0,00	1.475.984.492,00
Retribusi Pemakaian Alat-LO	475.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(125.000.000,00)	350.000.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	**13.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.300.000,00**
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	13.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	**617.849.585,00**	**0,00**	**0,00**	**40.327.461,00**	**0,00**	**0,00**	**658.177.046,00**

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PELUNASAN PIUTANG	PELUNASAN SALDO AWAL PIUTANG	PENETAPAN PIUTANG	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	KOREKSI LEBIH CATAT RETRIBUSI DAERAH-LO	LAPORAN OPERASIONAL
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	617.849.585,00	0,00	0,00	40.327.461,00	0,00	0,00	658.177.046,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	**141.614.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.614.550,00**
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	141.614.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.614.550,00
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO	**2.237.394.264,00**	**(39.417.700,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.197.976.564,00**
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO	2.237.394.264,00	(39.417.700,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.976.564,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	**794.980.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**794.980.440,00**
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	794.980.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.980.440,00
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	**1.421.133.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(900.368.250,00)**	**0,00**	**520.764.750,00**
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PELUNASAN PIUTANG	PELUNASAN SALDO AWAL PIUTANG	PENETAPAN PIUTANG	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	KOREKSI LEBIH CATAT RETRIBUSI DAERAH-LO	LAPORAN OPERASIONAL
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	**1.421.133.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(900.368.250,00)**	0,00	**520.764.750,00**
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	1.421.133.000,00	0,00	0,00	0,00	(900.368.250,00)	0,00	520.764.750,00
Retribusi Pertambangan Rakyat-LO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 7.5.244 Rincian Selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	LAPORAN OPERASIONAL	SELISIH
1	*2*	*3*	*4*
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**2.275.536.541,00**	**2.275.536.541,00**	**0,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	**2.275.536.541,00**	**2.275.536.541,00**	**0,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	**2.275.536.541,00**	**2.275.536.541,00**	**0,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.275.536.541,00	2.275.536.541,00	**0,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	0,00	0,00	**0,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	0,00	0,00	**0,00**

Tabel 7.5.245 Penjelasan Selisih Lain-lain PAD Yang Sah-LRA dengan Lain-lain PAD Yang Sah-LO

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENETAPAN PIUTANG	KOREKSI KURANG CATAT DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN	KOREKSI LEBIH CATAT PELUNASAN PIUTANG DENDA PAJAK DAERAH	KOREKSI KURANG CATAT PELUNASAN PIUTANG DENDA PAJAK DAERAH	PENGEMBALIAN ATAS TEMUAN	PELUNASAN SALDO AWAL PIUTANG	PENGEMBALIAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	KOREKSI LEBIH CATAT PENDAPATAN-LO	LAPORAN OPERASIONAL
Lain-lain PAD yang Sah-LO	**115.258.171.423,39**	**6.472.060,00**	**94.227.378,84**	**21.137.600,00**	**(2.823.200,00)**	**(2.013.251.879,39)**	**(15.827.431.571,32)**	**(1.000.000,00)**	**(191.172.941,67)**	**97.344.328.869,85**
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	**512.084.414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**512.084.414,00**
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	69.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.710.000,00
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-LO	442.374.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.374.414,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	**957.027.354,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(0,20)**	**0,00**	**(191.172.941,67)**	**765.854.412,60**
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO	957.027.354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,20)	0,00	(191.172.941,67)	765.854.412,60
Jasa Giro-LO	**3.616.972.805,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.616.972.805,65**
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	2.632.574.009,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632.574.009,25
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	732.404.374,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.404.374,11
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.994.422,29
Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP-LO	251.994.422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bunga-LO	**1.889.238.643,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.889.238.643,57**
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	1.889.238.643,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.238.643,57
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(1.000.000,00)**	**0,00**	**0,00**
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	**163.611,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.611,88**
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	163.611,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.611,88

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENETAPAN PIUTANG	KOREKSI KURANG CATAT DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN	KOREKSI LEBIH CATAT PELUNASAN PIUTANG DENDA PAJAK DAERAH	KOREKSI KURANG CATAT PELUNASAN PIUTANG DENDA PAJAK DAERAH	PENGEMBALIAN ATAS TEMUAN	PELUNASAN SALDO AWAL PIUTANG	PENGEMBALIAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	KOREKSI LEBIH CATAT PENDAPATAN-LO	LAPORAN OPERASIONAL
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	**80.794.464,06**	**0,00**	**94.227.378,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.021.842,90**
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	80.794.464,06	0,00	94.227.378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.021.842,90
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	**25.858.479.507,12**	**0,00**	**0,00**	**21.137.600,00**	**(2.823.200,00)**	**0,00**	**(15.805.216.633,12)**	**0,00**	**0,00**	**10.071.577.274,00**
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	9.948.896.000,00	0,00	0,00	21.137.600,00	(52.700,00)	0,00	(22.730.500,00)	0,00	0,00	9.947.250.400,00
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	2.837.900,00	0,00	0,00	0,00	(2.770.500,00)	0,00	(17.100,00)	0,00	0,00	50.300,00
Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	91.312.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.312.431,00
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO	15.782.762.058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.782.469.033,12)	0,00	0,00	293.025,00
Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	32.671.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.671.118,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	**35.861.416,00**	**929.116,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(489.938,00)**	**0,00**	**0,00**	**36.300.594,00**
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO	341.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.518,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	35.519.898,00	929.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(489.938,00)	0,00	0,00	35.959.076,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian-LO	**76.974.438.969,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(2.013.251.879,39)**	**(21.725.000,00)**	**0,00**	**0,00**	**74.939.462.090,57**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	268.279.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(222.862.551,00)	0,00	0,00	0,00	45.416.641,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	253.574.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(83.394.607,00)	0,00	0,00	0,00	170.179.813,00

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENETAPAN PIUTANG	KOREKSI KURANG CATAT DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN	KOREKSI LEBIH CATAT PELUNASAN PIUTANG DENDA PAJAK DAERAH	KOREKSI KURANG CATAT PELUNASAN PIUTANG DENDA PAJAK DAERAH	PENGEMBALIAN ATAS TEMUAN	PELUNASAN SALDO AWAL PIUTANG	PENGEMBALIAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	KOREKSI LEBIH CATAT PENDAPATAN-LO	LAPORAN OPERASIONAL
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	364.132.357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	(277.793.900,00)	0,00	0,00	0,00	86.338.457,64
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	320.811.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(105.817.400,00)	0,00	0,00	0,00	214.993.813,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan-LO	73.405.485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	(73.405.300,00)	0,00	0,00	0,00	185,28
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO	100.712.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.712.924,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada BUMD-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat-LO	73.454.915.493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	(66.533.791,67)	0,00	0,00	0,00	73.388.381.702,05
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya-LO	99.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.105,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	210.593.714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.853.900,00	0,00	0,00	0,00	203.739.814,15
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah-LO	23.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.580.000,00

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENETAPAN PIUTANG	KOREKSI KURANG CATAT DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN	KOREKSI LEBIH CATAT PELUNASAN PIUTANG DENDA PAJAK DAERAH	KOREKSI KURANG CATAT PELUNASAN PIUTANG DENDA PAJAK DAERAH	PENGEMBALIAN ATAS TEMUAN	PELUNASAN SALDO AWAL PIUTANG	PENGEMBALIAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	KOREKSI LEBIH CATAT PENDAPATAN-LO	LAPORAN OPERASIONAL
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO	27.694.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.620.000,00)	0,00	0,00	0,00	15.074.500,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-LO	47.696.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(45.264.729,72)	0,00	0,00	0,00	2.431.579,28
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-LO	449.997.751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	(423.704.200,00)	0,00	0,00	0,00	26.293.551,22
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-LO	692.508.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(692.508.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-LO	4.913.580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.492.700,00)	0,00	0,00	0,00	2.420.880,40
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Tanaman-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga-LO	113.766.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.766.600,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-LO	33.344.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.344.503,00

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENETAPAN PIUTANG	KOREKSI KURANG CATAT DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN	KOREKSI LEBIH CATAT PELUNASAN PIUTANG DENDA PAJAK DAERAH	KOREKSI KURANG CATAT PELUNASAN PIUTANG DENDA PAJAK DAERAH	PENGEMBALIAN ATAS TEMUAN	PELUNASAN SALDO AWAL PIUTANG	PENGEMBALIAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	KOREKSI LEBIH CATAT PENDAPATAN-LO	LAPORAN OPERASIONAL
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-LO	40.365.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.365.600,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	395.502.469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.725.000,00)	0,00	0,00	373.777.469,50
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD-LO	98.544.952,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.544.952,05
Pendapatan dari BLUD-LO	**5.227.554.179,52**	**5.542.944,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.233.097.123,52**
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	3.066.021.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066.021.531,00
Pendapatan BLUD dari Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	1.965.913.295,00	5.542.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.456.239,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	195.619.353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.619.353,52
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	**4.107.657,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.107.657,16**
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	4.107.657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107.657,16
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	**100.448.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.448.400,00**

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENETAPAN PIUTANG	KOREKSI KURANG CATAT DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN	KOREKSI LEBIH CATAT PELUNASAN PIUTANG DENDA PAJAK DAERAH	KOREKSI KURANG CATAT PELUNASAN PIUTANG DENDA PAJAK DAERAH	PENGEMBALIAN ATAS TEMUAN	PELUNASAN SALDO AWAL PIUTANG	PENGEMBALIAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	KOREKSI LEBIH CATAT PENDAPATAN-LO	LAPORAN OPERASIONAL
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	100.448.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.448.400,00

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pendapatan-LO untuk kode akun rincian objek 7.1.04.05.04 dengan uraian rincian objek Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO seharusnya dicatat pada kode akun objek 7.1.04.05.06 dengan uraian akun rincian objek Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP-LO, namun akun tersebut belum dimutakhirkan ke dalam aplikasi SIPD-RI.

7.5.4.1.2. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	1.971.160.493.024,00	**1.949.654.986.207,00**

Pendapatan Transfer-LO atau Dana Perimbangan adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Alokasi Pendapatan Transfer-LO untuk pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden RI mengenai Rincian APBN yang terdiri dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota (yang diterbitkan tiap tahun) dan disalurkan per periode sesuai dengan ketentuan penyaluran.

Pada Tahun 2024, Dana Perimbangan-LO disajikan pada kode akun objek 7.2.01.01 dengan uraian akun objek Dana Perimbangan-LO berikut rincian objek beserta sub rincian objeknya. Selanjutnya pada Tahun 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Surat dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.13/9845/Keuda Hal Penyeragaman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur dalam Penerimaan Daerah Tanggal 15 Desember 2025 dimana akun tersebut dimutakhirkan menjadi beberapa kode akun objek yaitu 7.2.01.07 dengan uraian akun Dana Bagi Hasil (DBH)-LO, 7.2.01.08 dengan uraian akun Dana Alokasi Umum (DAU)-LO, dan 7.2.01.09 dengan uraian akun Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO, berikut rincian objek beserta sub rincian objeknya.

Tabel 7.5.246 Pendapatan Transfer – LO

Jenis Pendapatan – LO	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
PENDAPATAN TRANSFER-LO	**1.971.160.493.024,00**	**1.949.654.986.207,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	**1.971.160.493.024,00**	**1.949.654.986.207,00**
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	**294.569.205.000,00**	**291.304.476.980,00**
DBH Pajak-LO	233.419.548.000,00	160.138.628.980,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO	59.993.223.000,00	129.350.216.000,00
DBH Lainnya-LO	1.156.434.000,00	1.815.632.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	**1.199.371.400.647,00**	**1.177.916.590.123,00**
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO	1.027.801.318.066,00	1.177.916.590.123,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO	171.570.082.581,00	0,00

Jenis Pendapatan – LO	Saldo 2025	Saldo 2024
	(Rp)	(Rp)
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	**453.983.730.377,00**	**469.118.831.104,00**
DAK Fisik-LO	88.988.492.951,00	157.564.483.366,00
DAK Non Fisik-LO	364.995.237.426,00	311.554.347.738,00
Insentif Fiskal-LO	**23.236.157.000,00**	**11.315.088.000,00**
Insentif Fiskal-LO	0,00	11.315.088.000,00
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya-LO	23.236.157.000,00	0,00

Pada Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp1.971.160.493.024,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp21.505.506.817,00 atau sebesar 1,10% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.949.654.986.207,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) - LO dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan tahun anggaran 2023 sebesar Rp22.961.292.000,00 yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2025 dan adanya penyaluran Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) berdasarkan Surat dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-35/PK/PK.2/2025 tentang Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah tahun anggaran 2025.
2. Sedangkan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) - LO mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat dalam meningkatkan alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*) demi mendukung pendanaan belanja pegawai formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.
3. Pada tahun 2025 Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh ketergantungan terhadap kebijakan penetapan alokasi dan pagu definitif dari Pemerintah Pusat, selain itu dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 akibat dari kebijakan pemerintah terkait dengan pencadangan transfer ke daerah menyebabkan pengurangan alokasi DAK Fisik untuk bagian pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Sementara itu, realisasi penerimaan Insentif Fiskal-LO pada tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, dipengaruhi oleh pemutakhiran data dana insentif fiskal tahun anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya yang didukung oleh keberhasilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan capaian penilaian kinerja daerah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah.

Apabila dibandingkan antara Pendapatan Transfer dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Pendapatan Transfer dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 7.5.247 Rincian Selisih Pendapatan Transfer-LRA dengan Pendapatan Transfer-LO

URAIAN	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	PENDAPATAN TRANSFER - LO	SELISIH
PENDAPATAN TRANSFER	**1.974.299.383.024,00**	**1.971.160.493.024,00**	**3.138.890.000,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.974.299.383.024,00**	**1.971.160.493.024,00**	**3.138.890.000,00**
Dana Bagi Hasil (DBH)	**297.708.095.000,00**	**294.569.205.000,00**	**3.138.890.000,00**
DBH Pajak	235.113.496.000,00	233.419.548.000,00	1.693.948.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA)	61.438.165.000,00	59.993.223.000,00	1.444.942.000,00
DBH Lainnya	1.156.434.000,00	1.156.434.000,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	**1.199.371.400.647,00**	**1.199.371.400.647,00**	**0,00**
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.027.801.318.066,00	1.027.801.318.066,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya	171.570.082.581,00	171.570.082.581,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	**453.983.730.377,00**	**453.983.730.377,00**	**0,00**
DAK Fisik	88.988.492.951,00	88.988.492.951,00	0,00
DAK Non Fisik	364.995.237.426,00	364.995.237.426,00	0,00
Insentif Fiskal	**23.236.157.000,00**	**23.236.157.000,00**	**0,00**
Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	23.236.157.000,00	23.236.157.000,00	0,00

Penjelasan selisih Pendapatan Transfer pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.248 Penjelasan Selisih Pendapatan Transfer-LRA dengan Pendapatan Transfer-LO

URAIAN	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	PENYALURAN KURANG BAYAR TDF 2024	PENDAPATAN TRANSFER - LO
PENDAPATAN TRANSFER	**1.974.299.383.024,00**	**(3.138.890.000,00)**	**1.971.160.493.024,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.974.299.383.024,00**	**(3.138.890.000,00)**	**1.971.160.493.024,00**

URAIAN	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	PENYALURAN KURANG BAYAR TDF 2024	PENDAPATAN TRANSFER - LO
Dana Bagi Hasil (DBH)	**297.708.095.000,00**	**(3.138.890.000,00)**	**294.569.205.000,00**
DBH Pajak	235.113.496.000,00	(1.693.948.000,00)	233.419.548.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA)	61.438.165.000,00	(1.444.942.000,00)	59.993.223.000,00
DBH Lainnya	1.156.434.000,00	0,00	1.156.434.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	**1.199.371.400.647,00**	**0,00**	**1.199.371.400.647,00**
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.027.801.318.066,00	0,00	1.027.801.318.066,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya	171.570.082.581,00	0,00	171.570.082.581,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	**453.983.730.377,00**	**0,00**	**453.983.730.377,00**
DAK Fisik	88.988.492.951,00	0,00	88.988.492.951,00
DAK Non Fisik	364.995.237.426,00	0,00	364.995.237.426,00
Insentif Fiskal	**23.236.157.000,00**	**0,00**	**23.236.157.000,00**
Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	23.236.157.000,00	0,00	23.236.157.000,00

7.5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	224.057.423.395,23	**170.967.444.887,66**

Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah - LO dan Pendapatan Transfer - LO (dana perimbangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO yang merupakan Pendapatan Hibah - LO dengan realisasi Tahun 2025 sebesar Rp224.057.423.395,23. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp53.089.978.507,57 atau sebesar 31,05% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp170.967.444.887,66 dipengaruhi oleh penerimaan atas Bantuan Pemerintah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Penerimaan Hibah berupa Aset Tetap yang diterima dari Kementerian (Kementerian Kesehatan, Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum - BPJN Kepulauan Riau, Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Bank Bukopin dan Masyarakat serta Hibah yang bersumber dari *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tabel 7.5.249 Pendapatan Hibah – LO

NO	OPD	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri-LO	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	Pendapatan Hibah dari Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	Sumbangan Pihak Ketiga/ Sejenis-LO	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=3+4+5+6+7+8*
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	316.300.000,00	376.941.277,16	693.241.277,16
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	118.747.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.747.600,00
3	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	1.294.704.000,00	0,00	0,00	1.294.704.000,00
4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.849.834.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.834.665,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	197.377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.377.000,00
6	Dinas Kesehatan	50.517.874.046,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.517.874.046,07
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	48.284.180.693,00	159.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.443.680.693,00
8	Dinas Pendidikan	56.041.180.290,00	0,00	25.461.782.700,00	384.337.822,00	0,00	0,00	81.887.300.812,00
9	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	1.310.000.000,00	339.962.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.962.204,00
10	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	37.404.701.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.404.701.098,00
	JUMLAH	**195.723.895.392,07**	**499.462.204,00**	**25.461.782.700,00**	**1.679.041.822,00**	**316.300.000,00**	**376.941.277,16**	**224.057.423.395,23**

Apabila dibandingkan antara Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 7.5.250 Rincian Selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	LAPORAN OPERASIONAL	SELISIH
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**1.798.843.934,57**	**224.057.423.395,23**	**(222.258.579.460,66)**
Pendapatan Hibah-LO	**1.798.843.934,57**	**224.057.423.395,23**	**(222.258.579.460,66)**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	**0,00**	**195.723.895.392,07**	**(195.723.895.392,07)**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	195.723.895.392,07	(195.723.895.392,07)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	**0,00**	**499.462.204,00**	**(499.462.204,00)**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	499.462.204,00	(499.462.204,00)
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	**0,00**	**25.461.782.700,00**	**(25.461.782.700,00)**

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	LAPORAN OPERASIONAL	SELISIH
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	25.461.782.700,00	(25.461.782.700,00)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	**1.294.704.000,00**	**1.995.341.822,00**	**(700.637.822,00)**
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	1.294.704.000,00	1.679.041.822,00	(384.337.822,00)
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	0,00	316.300.000,00	(316.300.000,00)
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	**504.139.934,57**	**376.941.277,16**	**127.198.657,41**
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	504.139.934,57	376.941.277,16	127.198.657,41

Penjelasan selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.251 Penjelasan selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP TANAH	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP LAINYA	PENERIMAAN HIBAH BARANG PERSEDIAAN	PENERIMAAN HIBAH BANPER	KOREKSI KURANG CATAT HIBAH CSR	REKLASIFIKASI DARI PENDAPATAN BLUD	KOREKSI LEBIH CATAT PENGAKUAN ASET TETAP DARI HIBAH BANPER	PENERIMAAN DARI SISA DANA SPP TAHUN 2024	LAPORAN OPERASIONAL
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**1.798.843.934,57**	**41.827.698.995,65**	**25.621.282.700,00**	**33.983.019.248,83**	**51.060.013.986,52**	**60.000.000,00**	**50.976.583.850,07**	**555.827.000,00**	**384.337.822,00**	**17.917.451.515,00**	**(437.000,00)**	**(127.198.657,41)**	**224.057.423.395,23**
Pendapatan Hibah-LO	**1.798.843.934,57**	**41.827.698.995,65**	**25.621.282.700,00**	**33.983.019.248,83**	**51.060.013.986,52**	**60.000.000,00**	**50.976.583.850,07**	**555.827.000,00**	**384.337.822,00**	**17.917.451.515,00**	**(437.000,00)**	**(127.198.657,41)**	**224.057.423.395,23**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	**0,00**	**41.511.398.995,65**	**0,00**	**33.983.019.248,83**	**51.060.013.986,52**	**60.000.000,00**	**50.636.621.646,07**	**555.827.000,00**	**0,00**	**17.917.451.515,00**	**(437.000,00)**	**0,00**	**195.723.895.392,07**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	41.511.398.995,65	0,00	33.983.019.248,83	51.060.013.986,52	60.000.000,00	50.636.621.646,07	555.827.000,00	0,00	17.917.451.515,00	(437.000,00)	0,00	195.723.895.392,07
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	**0,00**	**0,00**	**159.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339.962.204,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499.462.204,00**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	0,00	159.500.000,00	0,00	0,00	0,00	339.962.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.462.204,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri-LO	**0,00**	**0,00**	**25.461.782.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.461.782.700,00**
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	0,00	25.461.782.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	25.461.782.700,00
Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	**1.294.704.000,00**	**316.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384.337.822,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.995.341.822,00**

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP TANAH	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP LAINYA	PENERIMAAN HIBAH BARANG PERSEDIAAN	PENERIMAAN HIBAH BANPER	KOREKSI KURANG CATAT HIBAH CSR	REKLASIFIKASI DARI PENDAPATAN BLUD	KOREKSI LEBIH CATAT PENGAKUAN ASET TETAP DARI HIBAH BANPER	PENERIMAAN DARI SISA DANA SPP TAHUN 2024	LAPORAN OPERASIONAL
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	1.294.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.337.822,00	0,00	0,00	0,00	1.679.041.822,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	0,00	316.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.300.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	**504.139.934,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(127.198.657,41)**	**376.941.277,16**
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	504.139.934,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(127.198.657,41)	376.941.277,16

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO sebesar Rp224.057.423.395,23 tidak termasuk penerimaan hibah aset tetap yang bersumber dari *Program Corporate Social Responsibility (CSR)* dari PT. Ecogreen Oleochemicals kepada SMK Negeri 6 Batam berdasarkan Surat Hibah Nomor 031/EOB/HR-GA-RD/V-2025 Tanggal 21 Mei 2025 dan Surat Hibah Nomor 039/EOB/HR-GA-RT/VI-2025 Tanggal 30 Juni 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.252 Daftar Barang SMK Negeri 6 Batam yang bersumber dari CSR

Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan	Total Keseluruhan
1.3.2.01.01.010.005	Forklift Electric 3 Ton	Krisbow FB30	2012	1	95.000.000,00	95.000.000,00
1.3.2.01.01.010.005	Forklift Diesel 4 Ton	Caterpillar DP40KD	2003	1	115.000.000,00	115.000.000,00
Total						**210.000.000,00**

Namun dalam Berita Acara Serah Terima Barang/Surat Hibah tersebut diatas tidak disertai dengan pencantuman nilai barang yang memadai oleh pihak pemberi hibah sehingga pihak sekolah selaku penerima hibah belum dapat mencatat ke dalam Aset Tetap.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga menerima Bantuan Sarana Digitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk 67 (enam puluh tujuh) sekolah, namun sampai dengan tanggal pelaporan, aset berupa sarana digitalisasi tersebut belum dapat dicatat sebagai Aset Tetap pada sekolah penerima bantuan dikarenakan belum terdapat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Kemendikdasmen kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.253 Daftar Barang yang bersumber dari Bantuan Sarana Digitalisasi

No	Jenjang	Status Sekolah	Nama Sekolah	Kabupaten /Kota	Nama Barang	Jumlah	Nama Barang	Jumlah
1	SLB	Negeri	SLB NEGERI NATUNA	Kabupaten Natuna	TV Digital	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
2	SLB	Negeri	SLBN 1 TANJUNGPINANG	Kota Tanjungpinang	Smart Board plat plannel digital 75 inchi	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
3	SLB	Negeri	SLB NEGERI ANAMBAS	Kabupaten Kepulauan Anambas	Interactive Flat Panel (IFP) Berserta Kelengkapan	1 Set	Letop Merek zyrex	1
4	SLB	Negeri	SLBN 2 TANJUNGPINANG	Kota Tanjungpinang	Interactive Flat Panel (IFP) beserta perlengkapannya	1 Set	Letop Merek zyrex	1
5	SLB	Negeri	SLB NEGERI LINGGA	Kabupaten Lingga	Interaktif Flat Panel	1 Set	Letop Merek zyrex	1
6	SLB	Negeri	SLB NEGERI KIJANG	Kabupaten Bintan	Smartboard Interactive Flat Panel Hisense Beserta Kelengkapannya	1 Set	Letop Merek zyrex	1
7	SLB	Negeri	SLB NEGERI KARIMUN	Kabupaten Karimun	Hinsense IFP 75 inc Smart TV	1 Set	Letop Merek zyrex	1
8	SMA	Negeri	SMAN 1 BINTAN UTARA	Kabupaten Bintan	HISENSE IFP 75 Inchi75WM61FE 1.850x1.165x240mm, 57.5 kgs	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
9	SMA	Negeri	SMAN 1 BINTAN PESISIR	Kabupaten Bintan	Hisense IFP & Bracket	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
10	SMA	Negeri	SMAN 1 SIANTAN TIMUR	Kabupaten Kepulauan Anambas	Interactive Flat Panel (IFP)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
11	SMA	Negeri	SMAN 1 BUNGURAN UTARA	Kabupaten Natuna	Alat Digital PID Hisense	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1

No	Jenjang	Status Sekolah	Nama Sekolah	Kabupaten /Kota	Nama Barang	Jumlah	Nama Barang	Jumlah
12	SMA	Negeri	SMAN 23 BATAM	Kota Batam	IFP	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
13	SMA	Negeri	SMAN 2 BUNGURAN TIMUR	Kabupaten Natuna	Hisense IFP 75 inc	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
14	SMA	Negeri	SMAN 1 KARIMUN	Kabupaten Karimun	interactive flat panel (IFP)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
15	SMA	Negeri	SMAN 1 TOAPAYA	Kabupaten Bintan	INTERACTIVE FLAT PANEL (IFP)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
16	SMA	Negeri	SMAN 1 SENAYANG	Kabupaten Lingga	HISENSE IFP 75 INCI	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
17	SMA	Negeri	SMAN 1 SIANTAN	Kabupaten Kepulauan Anambas	Smartboard berupa Interactive flat panel (75wm61fe)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
18	SMA	Negeri	SMA NEGERI 1 SELAT GELAM	Kabupaten Karimun	HISENSE IFP 75 inch	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
19	SMA	Negeri	SMAN 1 BUNGURAN BARAT	Kabupaten Natuna	Layar IFT (Tipe : Hisense IFP 75 inci)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
20	SMA	Negeri	SMAN 25 BATAM	Kota Batam	Smartboard Berupa Interactive Flat Panel (IFP) Merek HISENSE	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
21	SMA	Negeri	SMAN 2 TANJUNGPINANG	Kota Tanjungpinang	INTERAKTIVE FLAT PANEL (IFP)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
22	SMA	Negeri	SMAN 4 TANJUNGPINANG	Kota Tanjungpinang	SMART TV HISENSE IFP 75WM61FE 1.850 x 240mm, 59,7 kg	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
23	SMA	Negeri	SMAN 24 BATAM	Kota Batam	TV IFP HISENSE	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
24	SMA	Negeri	SMAN 29 BATAM	Kota Batam	HISENSE IFP 75 INCH 75WM61FE	1 Set		
25	SMA	Negeri	SMAN 27 BATAM	Kota Batam	Head unit IFP Merk Hisense Tipe 75WM61FE	1 Set		
26	SMA	Negeri	SMAN 5 TANJUNGPINANG	Kota Tanjungpinang	Head unit IFP merk Hisense tipe 75WM61FE	1 Set		1
27	SMA	Negeri	SMAN 1 PULAU TIGA	Kabupaten Natuna	SMART BOARD INTERACTIVE FLAT PANEL	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
28	SMA	Negeri	SMAN 4 KARIMUN	Kabupaten Karimun	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm, 59.7 kgs	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
29	SMA	Negeri	SMAN 1 SUBI	Kabupaten Natuna	Interactive Flat Panel (IFP)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
30	SMA	Negeri	SMAN 2 TELUK BINTAN	Kabupaten Bintan	smart tv hisense merah putih	1 Set		1
31	SMA	Negeri	SMAN 4 KARIMUN	Kabupaten Karimun	HISENSE IFP	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
32	SMA	Negeri	SMAN 2 BINTAN PESISIR	Kabupaten Bintan	IFP 75 inci HISENSE	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
33	SMA	Negeri	SMAN 1 TEMIANG PESISIR	Kabupaten Lingga	Interactive Flat Panel (IFP)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
34	SMA	Negeri	SMAN 1 KEPULAUAN POSEK	Kabupaten Lingga	Papan Interaktif/TV	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
35	SMA	Negeri	SMAN 1 JEMAJA	Kabupaten Kepulauan Anambas	Head Unit IFP Merk Hisence Type 75WM61FE	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
36	SMA	Negeri	SMAN 1 LINGGA TIMUR	Kabupaten Lingga	INTERACTIVE FLAT PANEL (IFP) MERK HISENSE	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
37	SMA	Negeri	SMAN 1 LINGGA UTARA	Kabupaten Lingga	HISENSE IFP 75 Inch 75 WM61FE 1.850 x 1.165 x 240 mm, 59 kgs	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
38	SMA	Negeri	SMAN 2 PALMATAK	Kabupaten Kepulauan Anambas	Smartboard / Interactive flat panel / papan interaktif digital	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1

No	Jenjang	Status Sekolah	Nama Sekolah	Kabupaten /Kota	Nama Barang	Jumlah	Nama Barang	Jumlah
39	SMA	Negeri	SMAN 1 BAKUNG SERUMPUN	Kabupaten Lingga	Hisense IFP 75 inch	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
40	SMA	Negeri	SMAN 1 SERASAN	Kabupaten Natuna	Smartboard Head unit IFP Merk Hisensi Tipe 75WM61FE	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
41	SMA	Negeri	SMAN 3 KUNDUR	Kabupaten Karimun	Head unit IFP	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
42	SMA	Negeri	SMAN 3 KARIMUN	Kabupaten Karimun	Hisense Smartboard Interactive Flat Panel	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
43	SMK	Negeri	SMK NEGERI 4 TANJUNGPINANG	Kota Tanjungpinang	SMARTBOARD BERUPA INTERACTIVE FLAT PANEL	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
44	SMK	Negeri	SMK NEGERI 1 SENAYANG	Kabupaten Lingga	IFP	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
45	SMK	Negeri	SMK NEGERI 2 ANAMBAS	Kabupaten Kepulauan Anambas	INTERACTIVE FLAT PANEL	1 Set	LAPTOP MEREK ZYREX	1
46	SMK	Negeri	SMK NEGERI 1 SERI KUALA LOBAM	Kabupaten Bintan	Papan Interaktif Digital/ Interactive Flat Panel (IFP)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
47	SMK	Negeri	SMK NEGERI 2 BUNGURAN TIMUR	Kabupaten Natuna	HISENSE IFP 75 inchi	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
48	SMK	Negeri	SMK NEGERI 2 KARIMUN	Kabupaten Karimun	INTERACTIVE FLAT PANEL (IFP)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
49	SMK	Negeri	SMK NEGERI 7 BATAM	Kota Batam	Papan Interaktif Digital/Interactive Flat Panel (IFP)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
50	SMK	Negeri	SMK NEGERI 4 BATAM	Kota Batam	Interactive Flat Panel (IFP)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
51	SMK	Negeri	SMK NEGERI 5 TANJUNGPINANG	Kota Tanjungpinang	Papan Interaktif Digital/ Interactive Flat Panel (IFP)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
52	SMK	Negeri	SMK NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR LAUT	Kabupaten Natuna	SMART TV	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
53	SMK	Negeri	SMK NEGERI 4 ANAMBAS	Kabupaten Kepulauan Anambas	Papan Interaktif Digital (IFP)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
54	SMK	Negeri	SMKN 5 BATAM	Kota Batam	HISENSE IFP 75 inch 75WM61FE 1.850x1.165x240mm,	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
55	SMK	Negeri	SMK NEGERI 1 GUNUNG KIJANG	Kabupaten Bintan	IFP / Interactive Flat Panel	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
56	SMK	Negeri	SMK NEGERI 1 BUNGURAN BARAT	Kabupaten Natuna	HISENSE IFP 75 INCHI 75WW61FE 1.850X1.165X240MM,59,7KGS	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
57	SMK	Negeri	SMK NEGERI 2 LINGGA	Kabupaten Lingga	IPF	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
58	SMK	Negeri	SMK NEGERI KUNDUR	Kabupaten Karimun	Interactive Flat Panel (IFP) HISENSE IPF 75 Inch 75WM61FE	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
59	SMK	Negeri	SMK NEGERI 6 BATAM	Kota Batam	Smartboard	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
60	SMK	Negeri	SMK NEGERI 3 ANAMBAS	Kabupaten Kepulauan Anambas	Hisense IFP 75 inch 75WM61FE	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
61	SMK	Negeri	SMK NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR	Kabupaten Natuna	Papan Interaktif Digital/ Interactive Flat Panel (IFP)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
62	SMK	Negeri	SMK NEGERI 1 BINTAN UTARA	Kabupaten Bintan	SMARTBOARD	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
63	SMK	Negeri	SMK NEGERI 1 SINGKEP	Kabupaten Lingga	SMARTBOARD	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
64	SMK	Negeri	SMK NEGERI 1 SERI KUALA LOBAM	Kabupaten Bintan		1 Set	Laptop Merk Zyrex	1

No	Jenjang	Status Sekolah	Nama Sekolah	Kabupaten /Kota	Nama Barang	Jumlah	Nama Barang	Jumlah
65	SMK	Negeri	SMK NEGERI 4 TANJUNGPINANG	Kota Tanjungpinang	HI2510170011297	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1
66	SMK	Negeri	SMK NEGERI KUNDUR UTARA	Kabupaten Karimun	Papan Interaktif Digital	1 Set		
67	SMK	Negeri	SMKN 1 BINTAN TIMUR	Kabupaten Bintan	Interactive Flat Panel (IFP)	1 Set	Laptop Merk Zyrex	1

7.5.4.2. Beban - LO

Beban - LO	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	3.875.181.517.994,60	**4.377.962.746.624,97**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah, atau timbulnya kewajiban pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, dan/atau saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat beban pada Tahun 2025 sebesar Rp3.875.181.517.994,60 dengan rincian sebagai berikut:

7.5.4.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	2.958.491.006.575,28	**3.162.864.178.041,49**

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial dan Beban Penyisihan Piutang dengan realisasi tahun 2025 sebesar Rp2.958.491.006.575,28 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.254 Beban Operasi – LO

JENIS BEBAN OPERASI	SALDO 2025 (Rp)	SALDO 2024 (Rp)
Beban Pegawai	1.450.879.240.714,54	1.309.490.093.784,00
Beban Barang dan Jasa	1.321.670.657.789,70	1.466.829.936.561,96
Beban Bunga	0,00	3.078.651.404,00
Beban Subsidi	834.852.991,00	944.301.180,00
Beban Hibah	182.120.444.655,37	353.850.454.704,03
Beban Bantuan Sosial	1.834.940.000,00	4.002.925.000,00

JENIS BEBAN OPERASI	SALDO 2025	SALDO 2024
	(Rp)	(Rp)
Beban Penyisihan Piutang	1.150.870.424,67	24.667.815.407,50
JUMLAH	**2.958.491.006.575,28**	**3.162.864.178.041,49**

Rincian Beban Operasi adalah sebagai berikut:

7.5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Pegawai sebesar Rp1.450.879.240.714,54 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.5.255 Rincian Beban Pegawai

URAIAN	BEBAN PEGAWAI - LO
Beban Pegawai	**1.450.879.240.714,54**
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	**587.555.308.100,04**
Beban Gaji Pokok ASN	435.076.249.629,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	38.307.564.288,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	7.239.740.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	32.722.099.664,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.305.208.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	24.049.849.170,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	581.938.134,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	6.794.640,04
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	38.577.961.425,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	921.986.776,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.765.916.374,00
Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	**791.353.397.254,50**
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	399.184.136.323,50
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.091.725.590,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	35.414.209.626,50
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	9.618.291.967,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	181.628.187.927,50
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	164.416.845.820,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	**0,00**
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00
Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00
Beban Honorarium	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	**29.023.911.364,00**

URAIAN	BEBAN PEGAWAI - LO
Beban Uang Representasi DPRD	1.420.800.000,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	174.141.000,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	131.949.240,00
Beban Uang Paket DPRD	122.040.000,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	2.060.160.000,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	97.875.000,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.040.000.000,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	2.025.000.000,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	17.847.164,00
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.297.298.960,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	6.636.800.000,00
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	**1.186.363.100,00**
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	138.000.000,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.696.000,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	131.760.000,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.910.680,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.794.718,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.720,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	7.392.000,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	898.185.902,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	**3.000.017.856,00**
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	2.640.017.856,00
Beban Pegawai BLUD	**38.760.243.040,00**
Beban Pegawai BLUD	38.760.243.040,00

Dengan rincian beban pegawai menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.256 Beban Pegawai per SKPD Tahun 2025

NO	SKPD	BEBAN PEGAWAI TAHUN 2025	BEBAN PEGAWAI TAHUN 2024
1	Dinas Pendidikan	628.270.100.158,00	561.322.860.402,00
2	Dinas Kesehatan	22.202.635.160,00	20.407.161.637,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	128.223.278.477,00	98.479.478.307,00
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	55.669.828.988,00	52.835.898.137,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	21.327.273.335,00	19.497.505.591,00

NO	SKPD	BEBAN PEGAWAI TAHUN 2025	BEBAN PEGAWAI TAHUN 2024
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.744.445.455,00	8.309.645.864,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	16.542.364.038,00	13.563.164.083,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.568.311.690,00	5.887.518.189,00
9	Dinas Sosial	9.893.796.469,00	9.472.156.927,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	28.345.833.373,00	26.532.474.269,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.981.798.579,00	9.568.473.404,00
12	Dinas Perhubungan	13.841.119.140,00	12.601.582.139,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.552.448.992,00	9.162.363.624,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.241.670.925,00	8.254.822.216,00
15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	11.835.017.567,00	10.524.937.248,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8.634.284.940,04	8.516.853.904,00
17	Dinas Kebudayaan	8.184.258.684,00	7.616.837.601,00
18	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	14.301.153.296,00	12.293.524.767,00
19	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	25.010.899.072,00	24.670.214.454,00
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	9.392.728.388,00	9.256.442.477,00
21	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	18.724.136.706,00	17.570.415.602,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	28.978.239.646,00	25.204.302.736,00
23	Dinas Pariwisata	10.235.153.476,00	10.165.197.472,00
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.922.255.246,00	9.315.912.680,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.859.349.076,00	10.549.430.245,00
26	Biro Umum	85.966.333.404,00	74.113.808.923,00
27	Sekretariat DPRD	47.719.673.562,00	42.436.691.669,00
28	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	20.865.198.247,00	20.579.642.677,00
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	23.809.125.811,50	22.645.636.563,00
30	Badan Pendapatan Daerah	70.186.051.551,00	75.976.186.869,00
31	Badan Kepegawaian dan KORPRI	16.271.392.429,00	15.555.269.915,00
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	9.692.655.828,00	10.808.777.703,00

NO	SKPD	BEBAN PEGAWAI TAHUN 2025	BEBAN PEGAWAI TAHUN 2024
33	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.139.971.973,00	5.343.403.111,00
34	Badan Penghubung Daerah	4.136.023.642,00	3.647.428.517,00
35	Inspektorat	31.437.521.615,00	28.399.622.618,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.172.911.776,00	8.404.451.244,00
JUMLAH		**1.450.879.240.714,54**	**1.309.490.093.784,00**

Apabila dibandingkan antara Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Pegawai pada Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 7.5.257 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Pegawai-LRA dan Beban Pegawai-LO

URAIAN	BELANJA PEGAWAI - LRA	BEBAN PEGAWAI - LO	SELISIH
Beban Pegawai	**1.448.897.643.513,04**	**1.450.879.240.714,54**	**(1.981.597.201,50)**
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	**586.350.321.322,04**	**587.555.308.100,04**	**(1.204.986.778,00)**
Beban Gaji Pokok ASN	435.076.249.629,00	435.076.249.629,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	38.377.680.246,00	38.307.564.288,00	70.115.958,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	7.242.260.000,00	7.239.740.000,00	2.520.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	32.731.834.664,00	32.722.099.664,00	9.735.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.305.948.000,00	7.305.208.000,00	740.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	24.093.228.750,00	24.049.849.170,00	43.379.580,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	582.098.638,00	581.938.134,00	160.504,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	6.795.021,04	6.794.640,04	381,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	37.246.323.224,00	38.577.961.425,00	(1.331.638.201,00)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	921.986.776,00	921.986.776,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.765.916.374,00	2.765.916.374,00	0,00
Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	0,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	**791.519.964.438,00**	**791.353.397.254,50**	**166.567.183,50**
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	399.289.809.644,00	399.184.136.323,50	105.673.320,50
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.091.725.590,00	1.091.725.590,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	35.417.223.095,00	35.414.209.626,50	3.013.468,50
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	9.618.291.967,00	9.618.291.967,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	181.686.068.322,00	181.628.187.927,50	57.880.394,50
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	164.416.845.820,00	164.416.845.820,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00

URAIAN	BELANJA PEGAWAI - LRA	BEBAN PEGAWAI - LO	SELISIH
Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00
Beban Honorarium	0,00	0,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	**29.023.911.364,00**	**29.023.911.364,00**	**0,00**
Beban Uang Representasi DPRD	1.420.800.000,00	1.420.800.000,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	174.141.000,00	174.141.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	131.949.240,00	131.949.240,00	0,00
Beban Uang Paket DPRD	122.040.000,00	122.040.000,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	2.060.160.000,00	2.060.160.000,00	0,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	97.875.000,00	97.875.000,00	0,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.040.000.000,00	8.040.000.000,00	0,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	2.025.000.000,00	2.025.000.000,00	0,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	17.847.164,00	17.847.164,00	0,00
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.297.298.960,00	8.297.298.960,00	0,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	6.636.800.000,00	6.636.800.000,00	0,00
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	0,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	**1.186.363.100,00**	**1.186.363.100,00**	**0,00**
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.696.000,00	3.696.000,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	131.760.000,00	131.760.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.910.680,00	3.910.680,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.794.718,00	2.794.718,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.720,00	1.720,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	7.392.000,00	7.392.000,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	155.520,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	466.560,00	0,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	898.185.902,00	898.185.902,00	0,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	**3.000.017.856,00**	**3.000.017.856,00**	**0,00**
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	2.640.017.856,00	2.640.017.856,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	**37.817.065.433,00**	**38.760.243.040,00**	**(943.177.607,00)**
Beban Pegawai BLUD	37.817.065.433,00	38.760.243.040,00	(943.177.607,00)

Penjelasan selisih Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Pegawai pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.258 Penjelasan Selisih Perbedaan Belanja Pegawai-LRA dan Beban Pegawai-LO

URAIAN	BELANJA PEGAWAI - LRA	PELUNASAN UTANG TAHUN 2024	KOREKSI KELEBIHAN PEMBAYARAN	KOREKSI KURANG CATAT UTANG 2025	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2025	BEBAN PEGAWAI - LO
Beban Pegawai	**1.448.897.643.513,04**	**(188.239.845,00)**	**(131.697.128,50)**	**1.358.356.568,00**	**943.177.607,00**	**1.450.879.240.714,54**
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	**586.350.321.322,04**	**(26.879.252,00)**	**(126.490.538,00)**	**1.358.356.568,00**	**0,00**	**587.555.308.100,04**
Beban Gaji Pokok ASN	435.076.249.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.076.249.629,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	38.377.680.246,00	0,00	(70.115.958,00)	0,00	0,00	38.307.564.288,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	7.242.260.000,00	0,00	(2.520.000,00)	0,00	0,00	7.239.740.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	32.731.834.664,00	0,00	(9.735.000,00)	0,00	0,00	32.722.099.664,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.305.948.000,00	0,00	(740.000,00)	0,00	0,00	7.305.208.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	24.093.228.750,00	0,00	(43.379.580,00)	0,00	0,00	24.049.849.170,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	582.098.638,00	(160.504,00)	0,00	0,00	0,00	581.938.134,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	6.795.021,04	(381,00)	0,00	0,00	0,00	6.794.640,04
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	37.246.323.224,00	(26.718.367,00)	0,00	1.358.356.568,00	0,00	38.577.961.425,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	921.986.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.986.776,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.765.916.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765.916.374,00
Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	**791.519.964.438,00**	**(161.360.593,00)**	**(5.206.590,50)**	0,00	**0,00**	**791.353.397.254,50**
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	399.289.809.644,00	(102.934.201,00)	(2.739.119,50)	0,00	0,00	399.184.136.323,50
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.091.725.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.725.590,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	35.417.223.095,00	(2.787.095,00)	(226.373,50)	0,00	0,00	35.414.209.626,50
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	9.618.291.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.618.291.967,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	181.686.068.322,00	(55.639.297,00)	(2.241.097,50)	0,00	0,00	181.628.187.927,50
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	164.416.845.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.416.845.820,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

URAIAN	BELANJA PEGAWAI - LRA	PELUNASAN UTANG TAHUN 2024	KOREKSI KELEBIHAN PEMBAYARAN	KOREKSI KURANG CATAT UTANG 2025	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2025	BEBAN PEGAWAI - LO
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	**29.023.911.364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.023.911.364,00**
Beban Uang Representasi DPRD	1.420.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.800.000,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	174.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.141.000,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	131.949.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.949.240,00
Beban Uang Paket DPRD	122.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.040.000,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	2.060.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.160.000,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	97.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.875.000,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.040.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040.000.000,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	2.025.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000.000,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	17.847.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.847.164,00
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.297.298.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297.298.960,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	6.636.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636.800.000,00
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	**1.186.363.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.186.363.100,00**
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	138.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000.000,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696.000,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	131.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.760.000,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.910.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910.680,00

URAIAN	BELANJA PEGAWAI - LRA	PELUNASAN UTANG TAHUN 2024	KOREKSI KELEBIHAN PEMBAYARAN	KOREKSI KURANG CATAT UTANG 2025	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2025	BEBAN PEGAWAI - LO
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.794.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794.718,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	7.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392.000,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.520,00
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.560,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	898.185.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.185.902,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	**3.000.017.856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.017.856,00**
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	2.640.017.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.017.856,00
Beban Pegawai BLUD	**37.817.065.433,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**943.177.607,00**	**38.760.243.040,00**
Beban Pegawai BLUD	37.817.065.433,00	0,00	0,00	0,00	943.177.607,00	38.760.243.040,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Pegawai - LRA dengan Beban Pegawai - LO sebagai berikut:

a. Penambahan Utang Belanja Pegawai BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp943.177.607,00
b. Pengurangan Beban Pegawai yang merupakan Pelunasan Utang Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp188.239.845,00 terdiri dari:
    1. Badan Penghubung Daerah sebesar Rp381,00
    2. Dinas Kebudayaan sebesar Rp160.504,00
    3. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp42.374,00
    4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp162.944.705,00
    5. Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp25.091.881,00
c. Koreksi terkait kurang catat pengakuan utang belanja pegawai pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.358.356.568,00.
d. Koreksi terkait temuan BPK kelebihan atas pembayaran belanja pegawai pada beberapa OPD sebesar Rp131.697.128,50 antara lain:
    1. Badan Kepegawaian dan KORPRI sebesar Rp1.474.040,00
    2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp1.200.230,00
    3. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp10.172.711,50
    4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.752.390,00
    5. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp5.078.958,00
    6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp1.290.540,00
    7. Biro Umum sebesar Rp8.091.618,00
    8. Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.453.624,00
    9. Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp1.318.218,00
    10. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp3.505.370,00
    11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp1.413.012,00
    12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp6.247.182,00
    13. Dinas Pariwisata sebesar Rp156.690,00
    14. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp2.422.000,00
    15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp343.708,00
    16. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp2.181.452,00
    17. Dinas Pendidikan sebesar Rp54.590.716,00
    18. Dinas Perhubungan sebesar Rp1.089.782,00
    19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp739.944,00
    20. Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan sebesar Rp3.080.374,00
    21. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar Rp9.057.462,00
    22. Inspektorat sebesar Rp5.687.578,00
    23. Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp2.286.272,00
    24. Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp1.430.921,00
    25. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebesar Rp3.440.758,00
    26. Sekretariat DPRD sebesar Rp2.191.578,00

7.5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Barang dan Jasa sebesar Rp1.321.670.657.789,70 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.5.259 Rincian Beban Barang dan Jasa– LO

URAIAN BEBAN BARANG DAN JASA - LO	NILAI
Beban Barang dan Jasa	**1.321.670.657.789,70**
Beban Barang	472.436.194.231,17
Beban Jasa	437.520.817.204,03
Beban Pemeliharaan	49.703.116.160,08
Beban Perjalanan Dinas	86.488.124.033,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.225.898.677,00
Beban Barang dan Jasa BOS	0,00
Beban Barang dan Jasa BOSP	118.720.230.654,84
Beban Barang dan Jasa BLUD	131.576.276.829,58

i. Beban Barang

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Barang dengan realisasi sebesar Rp472.436.194.231,17 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.260 Rincian Beban Barang – LO

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Barang	**472.436.194.231,17**
Beban Barang Pakai Habis	468.300.376.877,17
Beban Barang Tak Habis Pakai	4.420.000,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	4.131.397.354,00

Dengan rincian Beban Barang menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.261 Beban Barang per SKPD Tahun 2025

NO	SKPD	BEBAN BARANG TAHUN 2025	BEBAN BARANG TAHUN 2024
1	Dinas Pendidikan	11.828.507.996,00	31.237.986.026,00
2	Dinas Kesehatan	59.628.787.443,43	61.377.059.585,89
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	3.399.197.615,45	843.104.651,00
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	3.164.082.941,90	3.573.640.804,80
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	76.749.941.098,23	39.022.644.682,72

NO	SKPD	BEBAN BARANG TAHUN 2025	BEBAN BARANG TAHUN 2024
6	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	199.514.406.127,61	108.163.795.265,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.003.623.252,00	1.843.566.850,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	1.328.381.978,00	2.210.841.485,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	501.591.870,00	1.170.643.090,00
10	Dinas Sosial	3.391.871.601,00	8.100.441.560,00
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.679.682.538,00	512.224.641,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.310.442.967,00	4.677.392.800,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.360.378.945,00	2.092.528.600,00
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	297.043.876,00	670.060.690,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.953.404.044,00	2.927.479.600,00
16	Dinas Kebudayaan	829.866.717,00	1.676.193.545,00
17	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	1.334.811.178,00	1.070.156.350,44
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	3.001.064.348,00	3.300.724.113,00
19	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	5.587.371.339,05	9.538.441.937,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.190.573.709,00	1.378.582.091,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.238.710.203,00	1.766.996.854,00
22	Dinas Perhubungan	7.954.105.946,21	2.315.690.266,08
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.042.381.872,12	2.766.565.592,00
24	Dinas Pariwisata	1.853.235.095,00	920.707.400,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	385.331.878,00	6.527.434.460,81
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.442.966.053,00	1.263.406.040,00
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	151.854.655,50	243.103.782,00
28	Inspektorat	3.354.629.412,00	3.165.816.061,50
29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.797.503.348,00	3.279.601.267,00
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	6.151.363.606,67	9.919.890.732,67
31	Badan Pendapatan Daerah	6.929.293.515,00	9.251.139.118,00
32	Badan Kepegawaian dan Korpri	691.109.779,00	814.479.167,00

NO	SKPD	BEBAN BARANG TAHUN 2025	BEBAN BARANG TAHUN 2024
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	995.364.922,00	1.288.219.766,00
34	Sekretariat DPRD	19.953.964.110,00	24.625.967.412,00
35	Badan Penghubung Daerah	2.858.598.359,00	3.634.186.867,00
36	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	514.625.731,00	655.129.088,00
37	Biro Kesejahteraan Rakyat	2.552.241.488,00	5.010.398.300,00
38	Biro Pengadaan Barang/Jasa	308.894.425,00	310.393.200,00
39	Biro Perekonomian dan Pembangunan	302.551.354,00	479.061.346,00
40	Biro Organisasi	192.475.006,00	312.116.967,00
41	Biro Administrasi Pimpinan	1.281.425.687,00	2.868.759.475,00
42	Biro Umum	23.107.285.401,00	30.088.912.731,00
43	Biro Hukum	321.250.800,00	570.174.650,00
JUMLAH BEBAN BARANG		**472.436.194.231,17**	**397.465.658.910,91**

Apabila dibandingkan antara Belanja Barang dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Barang dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 7.5.262 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Barang-LRA dan Beban Barang-LO

URAIAN	BELANJA BARANG - LRA	BEBAN BARANG - LO	SELISIH
Beban Barang	**314.317.487.277,45**	**472.436.194.231,17**	**(158.118.706.953,72)**
Beban Barang Pakai Habis	311.125.390.664,45	468.300.376.877,17	(157.174.986.212,72)
Beban Barang Tak Habis Pakai	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.187.676.613,00	4.131.397.354,00	(943.720.741,00)

Penjelasan selisih Belanja Barang pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Barang pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.263 Penjelasan Selisih Perbedaan Belanja Barang-LRA dan Beban Barang-LO

URAIAN	Belanja Barang - LRA	Utang Tahun 2025	Pembebanan Persediaan Awal	Hibah Pemerintah Pusat /Daerah	Reklasifikasi Tambah dari Beban/Aset Tetap	Aset Ekstrakomtabel	Pelunasan Utang Tahun 2024	Persediaan Akhir 2025	Kapitalisasi ke Aset Tetap	Reklasifikasi Kurang ke Beban/Aset Tetap	Koreksi Kelebihan Pembayaran	Beban Barang - LO
Beban Barang	**314.317.487.277,45**	**37.477.908.260,09**	**277.859.094.229,74**	**50.976.583.850,07**	**8.418.698.532,02**	**2.643.308.140,00**	**(116.259.918.966,50)**	**(97.752.049.536,40)**	**(4.173.916.153,26)**	**(956.372.432,00)**	**(114.628.970,04)**	**472.436.194.231,17**
Beban Barang Pakai Habis	311.125.390.664,45	36.092.936.190,09	277.859.094.229,74	50.976.583.850,07	8.418.698.532,02	0,00	(116.247.978.966,50)	(97.752.049.536,40)	(1.101.296.684,26)	(956.372.432,00)	(114.628.970,04)	468.300.376.877,17
Beban Barang Tak Habis Pakai	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420.000,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.187.676.613,00	1.384.972.070,00	0,00	0,00	0,00	2.643.308.140,00	(11.940.000,00)	0,00	(3.072.619.469,00)	0,00	0,00	4.131.397.354,00

ii. Beban Jasa

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Jasa dengan realisasi sebesar Rp437.520.817.204,03 rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.264 Rincian Beban Jasa – LO

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Jasa	**437.520.817.204,03**
Beban Jasa Kantor	314.913.860.652,48
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	40.850.882.733,07
Beban Sewa Tanah	127.150.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	33.836.052.110,67
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	12.762.847.895,37
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	19.448.190.139,44
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.793.506.550,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	0,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	75.000.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.408.051.480,00
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	2.305.275.643,00

Dengan rincian Beban Jasa menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.265 Beban Jasa per SKPD Tahun 2025

NO	SKPD	BEBAN JASA TAHUN 2025	BEBAN JASA TAHUN 2024
1	Dinas Pendidikan	98.790.127.198,49	99.926.241.238,92
2	Dinas Kesehatan	36.172.054.368,22	40.771.960.701,79
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	13.171.008.229,00	26.638.000.765,33
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	7.033.663.469,00	8.787.880.121,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	16.317.120.546,65	16.838.172.059,60
6	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	13.432.919.677,00	4.262.608.365,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.825.301.448,00	9.760.894.778,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	4.139.423.362,00	8.022.859.006,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.380.210.337,33	2.281.984.318,00
10	Dinas Sosial	2.272.470.116,33	3.214.960.874,45

NO	SKPD	BEBAN JASA TAHUN 2025	BEBAN JASA TAHUN 2024
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	6.749.415.673,00	4.531.937.705,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.569.494.423,00	18.682.166.200,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14.158.919.144,00	5.380.003.055,00
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.906.245.615,00	2.131.468.777,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6.844.287.238,00	7.082.460.985,00
16	Dinas Kebudayaan	3.075.301.133,00	4.466.910.845,00
17	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	3.883.046.032,00	5.483.232.232,71
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4.292.714.157,00	4.830.921.835,11
19	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	4.355.153.397,00	3.676.129.319,50
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.371.945.241,00	2.856.705.146,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.614.874.779,00	2.161.284.107,00
22	Dinas Perhubungan	3.402.074.182,56	5.441.804.454,51
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.401.707.022,00	15.838.321.257,00
24	Dinas Pariwisata	8.250.571.278,00	14.702.590.474,33
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.806.824.991,00	2.815.255.680,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.435.733.479,00	6.947.819.670,00
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	472.576.197,67	376.416.458,33
28	Inspektorat	3.685.555.711,00	3.802.260.744,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.115.668.592,22	4.834.355.770,12
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	14.779.291.839,11	16.077.523.429,56
31	Badan Pendapatan Daerah	17.628.022.387,69	22.831.854.569,79
32	Badan Kepegawaian dan Korpri	1.475.224.540,00	1.248.484.856,00
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.817.684.245,00	1.561.392.136,00
34	Sekretariat DPRD	35.213.467.535,83	49.593.376.963,84
35	Badan Penghubung Daerah	4.272.308.590,00	6.161.673.826,00
36	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.228.315.802,00	1.456.104.785,00
37	Biro Kesejahteraan Rakyat	10.565.691.593,00	14.134.948.748,00

NO	SKPD	BEBAN JASA TAHUN 2025	BEBAN JASA TAHUN 2024
38	Biro Pengadaan Barang/Jasa	788.066.312,00	1.397.926.256,00
39	Biro Perekonomian dan Pembangunan	650.730.857,00	1.312.088.083,00
40	Biro Organisasi	368.126.625,00	659.769.861,00
41	Biro Administrasi Pimpinan	3.614.620.739,00	6.045.393.222,00
42	Biro Umum	35.508.526.921,93	48.264.783.908,93
43	Biro Hukum	684.332.179,00	1.544.470.639,00
	JUMLAH BEBAN JASA	**437.520.817.204,03**	**508.837.398.227,82**

Apabila dibandingkan antara Belanja Jasa dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Jasa dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 7.5.266 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Jasa-LRA dan Beban Jasa-LO

URAIAN	BELANJA JASA - LRA	BEBAN JASA - LO	SELISIH
Beban Jasa	**446.336.500.472,61**	**437.520.817.204,03**	**8.815.683.268,58**
Beban Jasa Kantor	310.444.272.893,34	314.913.860.652,48	(4.469.587.759,14)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	40.903.232.169,75	40.850.882.733,07	52.349.436,68
Beban Sewa Tanah	127.150.000,00	127.150.000,00	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	33.725.341.655,00	33.836.052.110,67	(110.710.455,67)
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	13.252.413.054,00	12.762.847.895,37	489.565.158,63
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	30.746.441.227,52	19.448.190.139,44	11.298.251.088,08
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.287.122.350,00	3.793.506.550,00	493.615.800,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	0,00	0,00	0,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.470.251.480,00	9.408.051.480,00	1.062.200.000,00
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	2.305.275.643,00	2.305.275.643,00	0,00

Penjelasan selisih Belanja Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Jasa pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 7.5.267 Penjelasan Selisih Perbedaan Belanja Jasa-LRA dan Beban Jasa-LO

URAIAN	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2025	KOREKSI KURANG CATAT UTANG	PEMBEBANAN BEBAN SEWA DIBAYAR DIMUKA TAHUN 2024	REKLASIFIKASI ANTAR BEBAN	KOREKSI KELEBIHAN PEMBAYARAN	PELUNASAN UTANG TAHUN 2024	BEBAN SEWA DIBAYAR DIMUKA TAHUN 2025	KAPITALISASI BEBAN KE ASET TETAP	REKLASIFIKASI KE PERSEDIAAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Jasa	446.336.500.472,61	20.997.959.801,31	926.000,00	1.753.866.905,29	781.660.000,00	(30.261.000,00)	(21.374.130.656,62)	(1.984.982.256,93)	(8.271.205.012,43)	(689.517.049,20)	437.520.817.204,03
Beban Jasa Kantor	310.444.272.893,34	10.356.832.370,00	0,00	0,00	68.500.000,00	0,00	(5.955.744.610,86)	0,00	0,00	0,00	314.913.860.652,48
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	40.903.232.169,75	420.247.200,00	926.000,00	356.394.728,36	0,00	(30.261.000,00)	(267.107.277,00)	(532.549.088,04)	0,00	0,00	40.850.882.733,07
Beban Sewa Tanah	127.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.150.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	33.725.341.655,00	179.249.720,00	0,00	18.526.666,67	713.160.000,00	0,00	(778.543.431,00)	(21.682.500,00)	0,00	0,00	33.836.052.110,67
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	13.252.413.054,00	363.400.000,00	0,00	1.378.945.510,26	0,00	0,00	(801.160.000,00)	(1.430.750.668,89)	0,00	0,00	12.762.847.895,37
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	30.746.441.227,52	9.162.510.511,31	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.500.039.537,76)	0,00	(8.271.205.012,43)	(689.517.049,20)	19.448.190.139,44
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.287.122.350,00	128.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(622.335.800,00)	0,00	0,00	0,00	3.793.506.550,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.470.251.480,00	387.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.449.200.000,00)	0,00	0,00	0,00	9.408.051.480,00
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	2.305.275.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.275.643,00

iii. Beban Pemeliharaan

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Pemeliharaan dengan realisasi sebesar Rp49.703.116.160,08 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.268 Rincian Beban Pemeliharaan – LO

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Pemeliharaan	**49.703.116.160,08**
Beban Pemeliharaan Tanah	2.308.892.050,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.850.504.675,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.412.626.792,41
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.131.092.642,67

Dengan rincian Beban Pemeliharaan menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.269 Beban Pemeliharaan per SKPD Tahun 2025

NO	SKPD	BEBAN PEMELIHARAAN TAHUN 2025	BEBAN PEMELIHARAAN TAHUN 2024
1	Dinas Pendidikan	1.652.079.799,00	739.863.944,00
2	Dinas Kesehatan	268.658.304,00	511.491.074,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	1.662.323.090,00	76.951.020,00
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	323.410.000,00	1.596.160.300,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	28.871.731.664,12	12.648.999.421,00
6	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	255.112.105,00	1.139.097.900,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	154.459.303,00	82.656.500,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	590.125.043,00	179.418.185,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	124.837.151,00	199.803.792,36
10	Dinas Sosial	136.778.085,00	282.613.055,40
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	413.754.033,00	46.885.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	114.778.312,00	197.810.500,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	98.568.914,00	107.284.300,00
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	124.500.750,00	124.800.250,00

NO	SKPD	BEBAN PEMELIHARAAN TAHUN 2025	BEBAN PEMELIHARAAN TAHUN 2024
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	94.557.648,00	70.765.000,00
16	Dinas Kebudayaan	186.819.583,31	95.530.350,00
17	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	85.135.600,00	198.496.089,27
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	135.009.220,00	583.344.868,91
19	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	192.661.737,00	258.857.012,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	244.399.277,00	363.983.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	62.261.271,00	149.999.721,00
22	Dinas Perhubungan	663.933.768,85	22.928.303.202,54
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	323.302.051,80	1.091.310.640,00
24	Dinas Pariwisata	33.432.002,00	87.304.000,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	258.510.740,00	2.205.311.654,44
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	87.137.000,00	94.630.800,00
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.234.234,00	0,00
28	Inspektorat	583.028.297,00	701.540.880,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	349.580.580,00	505.240.450,00
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	643.694.828,95	1.012.487.580,81
31	Badan Pendapatan Daerah	2.978.072.628,00	3.369.295.295,20
32	Badan Kepegawaian dan Korpri	43.301.800,00	101.381.149,00
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	390.132.713,00	200.907.253,00
34	Sekretariat DPRD	1.570.813.272,00	3.037.982.597,00
35	Badan Penghubung Daerah	656.212.796,00	1.071.900.887,00
36	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	134.525.098,00	79.006.500,00
37	Biro Kesejahteraan Rakyat	97.471.820,00	101.900.000,00
38	Biro Pengadaan Barang/Jasa	44.863.460,00	80.238.881,00
39	Biro Perekonomian dan Pembangunan	37.638.100,00	56.355.000,00
40	Biro Organisasi	44.204.700,00	76.079.000,00

NO	SKPD	BEBAN PEMELIHARAAN TAHUN 2025	BEBAN PEMELIHARAAN TAHUN 2024
41	Biro Administrasi Pimpinan	30.808.000,00	72.789.800,00
42	Biro Umum	4.861.903.981,05	8.716.515.608,83
43	Biro Hukum	77.353.400,00	41.810.000,00
	Jumlah Beban Pemeliharaan	**49.703.116.160,08**	**65.287.102.461,76**

Apabila dibandingkan antara Belanja Pemeliharaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Pemeliharaan dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 7.5.270 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Pemeliharaan -LRA dan Beban Pemeliharaan-LO

URAIAN	BELANJA PEMELIHARAAN - LRA	BEBAN PEMELIHARAAN - LO	SELISIH
Beban Pemeliharaan	**41.750.101.777,92**	**49.703.116.160,08**	**(7.953.014.382,16)**
Beban Pemeliharaan Tanah	2.080.412.050,00	2.308.892.050,00	(228.480.000,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.807.801.498,00	10.850.504.675,00	1.957.296.823,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.189.625.013,00	17.412.626.792,41	(5.223.001.779,41)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.672.263.216,92	19.131.092.642,67	(4.458.829.425,75)

Penjelasan selisih Belanja Pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.271 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Pemeliharaan -LRA dan Beban Pemeliharaan-LO

URAIAN	BELANJA PEMELIHARAAN - LRA	REKLASIFIKASI KE PERSEDIAAN	KAPITALISASI KE ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN	PELUNASAN UTANG TAHUN 2024	KOREKSI CATAT NILAI UTANG	KOREKSI KELEBIHAN PEMBAYARAN	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2025	REKLASIFIKASI MASUK ANTAR BEBAN	REKLASIFIKASI DARI ASET TETAP	BEBAN PEMELIHARAAN - LO
Beban Pemeliharaan	**41.750.101.777,92**	**(704.254.145,82)**	**(114.721.789,00)**	**(8.768.123.331,84)**	**(172.751.835,19)**	**(8.877.002,35)**	**12.245.040.336,36**	**171.052.632,00**	**5.305.649.518,00**	**49.703.116.160,08**
Beban Pemeliharaan Tanah	2.080.412.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.480.000,00	0,00	0,00	2.308.892.050,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.807.801.498,00	0,00	0,00	(2.543.202.023,00)	0,00	0,00	467.427.232,00	117.387.968,00	1.090.000,00	10.850.504.675,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.189.625.013,00	(704.254.145,82)	(114.721.789,00)	(1.550.981.235,40)	(74.099.454,41)	0,00	7.191.190.672,04	53.664.664,00	422.203.068,00	17.412.626.792,41
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.672.263.216,92	0,00	0,00	(4.673.940.073,44)	(98.652.380,78)	(8.877.002,35)	4.357.942.432,32	0,00	4.882.356.450,00	19.131.092.642,67

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Pemeliharaan-LRA dengan Beban Pemeliharaan-LO sebagai berikut:

a. Penambahan Beban Pemeliharaan terdiri dari :
    1. Penambahan Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 sebesar Rp12.245.040.336,36 terdiri dari:
        a) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp47.603.558,00
        b) Badan Penghubung Daerah sebesar Rp123.056.686,00
        c) Biro Umum sebesar Rp657.302.686,00
        d) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp185.718.540,00
        e) Dinas Kesehatan sebesar Rp30.489.200,00
        f) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp40.576.050,00
        g) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp25.850.000,00
        h) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp53.893.500,00
        i) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp8.956.029.273,91
        j) Dinas Pendidikan sebesar Rp742.170.643,00
        k) Dinas Perhubungan sebesar Rp547.560.285,45
        l) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp19.200.000,00
        m) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar Rp188.582.229,00
        n) Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp191.645.940,00
        o) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebesar Rp98.771.443,00
        p) Sekretariat DPRD sebesar Rp336.590.302,00
    2. Reklasifikasi antar Beban sebesar Rp171.052.632,00 terdiri dari:
        a) Reklasifikasi Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ke Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang pada Dinas Perhubungan sebesar Rp117.387.968,00
        b) Reklasifikasi Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi ke Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp53.664.664,00
    3. Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp5.305.649.518,00 terdiri dari:
        a) Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud Lainnya ke Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp179.415.000,00
        b) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp132.330.850,00 antara lain:
            1) Reklasifikasi Peralatan Personal Computer ke Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebesar Rp1.090.000,00

2) Reklasifikasi Rambu Tidak Bersuar ke Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi pada Dinas Perhubungan sebesar Rp131.240.850,00

c) Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung Kantor ke Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Pendidikan sebesar Rp242.788.068,00

d) Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Beban Pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp4.751.115.600,00 antara lain:
   1) Reklasifikasi Jalan Provinsi ke Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi sebesar Rp3.406.934.600,00
   2) Reklasifikasi Jalan Provinsi ke Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain sebesar Rp1.344.181.000,00

b. Pengurangan Beban Pemeliharaan terdiri dari:
   1. Pelunasan Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp8.768.123.331,84 antara lain:
      a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp31.790.000,00
      b) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp548.214.838,00
      c) Badan Penghubung Daerah sebesar Rp49.050.000,00
      d) Biro Administrasi Pimpinan sebesar Rp36.990.000,00
      e) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp1.408.719.873,44
      f) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp137.600.000,00
      g) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp23.025.000,00
      h) Dinas Kesehatan sebesar Rp24.145.000,00
      i) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp71.815.000,00
      j) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp35.000.000,00
      k) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp38.323.400,00
      l) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp184.073.000,00
      m) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp3.600.467.935,00
      n) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp39.241.000,00
      o) Dinas Pendidikan sebesar Rp200.525.000,00
      p) Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan sebesar Rp43.155.290,40
      q) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp631.463.000,00
      r) Inspektorat sebesar Rp242.507.140,00
      s) Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp50.000.000,00
      t) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebesar Rp100.887.395,00
      u) Sekretariat DPRD sebesar Rp1.259.985.460,00
   2. Reklasifikasi ke Persediaan yang merupakan reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan

Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara ke Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Perhubungan sebesar Rp704.254.145,82

3. Kapitalisasi Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung ke dalam Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Pendidikan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp114.721.789,00
4. Koreksi terkait kelebihan pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp8.877.002,35
5. Koreksi terkait potensi kelebihan pembayaran atas utang belanja pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp172.751.835,19

iv. Beban Perjalanan Dinas

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp86.488.124.033,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.272 Rincian Beban Perjalanan Dinas – LO

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Perjalanan Dinas	**86.488.124.033,00**
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	86.318.107.764,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	170.016.269,00

Dengan rincian Beban Perjalanan Dinas menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.273 Beban Perjalanan Dinas per SKPD Tahun 2025

NO	SKPD	BEBAN PERJALANAN DINAS TAHUN 2025	BEBAN PERJALANAN DINAS TAHUN 2024
1	Dinas Pendidikan	2.969.491.880,00	7.341.016.979,00
2	Dinas Kesehatan	2.673.748.482,00	4.342.109.248,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	37.320.578,00	92.932.758,00
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	193.547.701,00	589.942.422,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	3.983.016.999,00	5.370.449.824,00
6	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	1.586.435.021,00	2.654.332.171,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.372.490.435,00	2.765.099.257,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	453.135.482,00	1.180.479.003,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	386.527.274,00	1.071.060.282,00

NO	SKPD	BEBAN PERJALANAN DINAS TAHUN 2025	BEBAN PERJALANAN DINAS TAHUN 2024
10	Dinas Sosial	1.328.240.226,00	2.940.406.358,00
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	848.151.515,00	868.041.308,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	687.426.551,00	1.534.779.462,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.233.646.250,00	1.348.489.472,00
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	609.505.114,00	1.296.374.370,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.491.815.888,00	1.584.811.005,00
16	Dinas Kebudayaan	273.812.101,00	1.481.429.050,00
17	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	522.292.596,00	647.925.815,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1.280.080.269,00	2.002.371.511,00
19	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	1.765.934.254,00	1.886.980.765,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.423.027.561,00	1.590.327.624,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	865.275.983,00	2.242.469.505,00
22	Dinas Perhubungan	748.473.678,00	1.480.271.525,00
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.254.952.399,00	2.228.669.986,00
24	Dinas Pariwisata	797.928.749,00	1.329.027.077,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.403.025.000,00	2.602.261.098,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.391.916.958,00	2.353.359.427,00
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	364.928.473,00	881.198.157,00
28	Inspektorat	9.591.579.158,00	8.166.344.342,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.364.755.324,00	3.392.886.881,00
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.122.541.788,00	7.462.761.872,50
31	Badan Pendapatan Daerah	2.773.082.734,00	4.639.253.308,00
32	Badan Kepegawaian dan Korpri	476.961.554,00	974.600.145,00
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	921.347.963,00	1.430.097.995,00
35	Sekretariat DPRD	21.566.858.562,00	25.597.007.522,00
36	Badan Penghubung Daerah	689.280.891,00	1.059.228.394,00

NO	SKPD	BEBAN PERJALANAN DINAS TAHUN 2025	BEBAN PERJALANAN DINAS TAHUN 2024
37	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	716.178.054,00	1.892.439.951,00
38	Biro Kesejahteraan Rakyat	2.312.384.039,00	2.958.612.726,00
39	Biro Pengadaan Barang/Jasa	192.610.564,00	354.256.731,00
40	Biro Perekonomian dan Pembangunan	588.662.415,00	1.201.169.535,00
41	Biro Organisasi	276.457.039,00	591.554.063,00
42	Biro Administrasi Pimpinan	907.477.674,00	2.739.658.348,00
43	Biro Umum	4.655.649.417,00	6.925.324.166,00
44	Biro Hukum	386.149.440,00	816.946.807,00
	JUMLAH BEBAN PERJALANAN DINAS	**86.488.124.033,00**	**125.908.758.245,50**

Apabila dibandingkan antara Belanja Perjalanan Dinas pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 7.5.274 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Perjalanan Dinas -LRA dan Beban Perjalanan Dinas -LO

URAIAN	BELANJA PERJALANAN DINAS - LRA	BEBAN PERJALANAN DINAS - LO	SELISIH
Beban Perjalanan Dinas	**87.845.288.867,00**	**86.488.124.033,00**	**1.357.164.834,00**
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.675.272.598,00	86.318.107.764,00	1.357.164.834,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	170.016.269,00	170.016.269,00	0,00

Penjelasan selisih Belanja Perjalanan Dinas pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.275 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Perjalanan Dinas-LRA dan Beban Perjalanan Dinas-LO

URAIAN	BELANJA PERJALANAN DINAS - LRA	PELUNASAN UTANG TAHUN 2024	KOREKSI KELEBIHAN PEMBAYARAN	BEBAN PERJALANAN DINAS - LO
Beban Perjalanan Dinas	**87.845.288.867,00**	**(1.055.124.858,00)**	**(302.039.976,00)**	**86.488.124.033,00**
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.675.272.598,00	(1.055.124.858,00)	(302.039.976,00)	86.318.107.764,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	170.016.269,00	0,00	0,00	170.016.269,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Perjalanan Dinas - LRA dengan Beban Perjalanan Dinas - LO adalah sebagai berikut:

a. Pengurangan Beban Perjalanan Dinas yang merupakan Pelunasan Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 sebesar Rp1.055.124.858,00 terdiri dari:
    1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp20.025.800,00
    2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp411.827.700,00
    3. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp12.323.200,00
    4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp177.037.556,00
    5. Dinas Pendidikan sebesar Rp285.017.310,00
    6. Dinas Perhubungan sebesar Rp28.573.676,00
    7. Dinas Sosial sebesar Rp120.319.616,00
b. Koreksi terkait temuan BPK kelebihan atas pembayaran belanja perjalanan dinas pada beberapa OPD sebesar Rp302.039.976,00 antara lain:
    1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp2.150.000,00
    2. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.435.000,00
    3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp950.200,00
    4. Badan Penghubung Daerah sebesar Rp5.340.600,00
    5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp1.580.511,00
    6. Biro Administrasi Pimpinan sebesar Rp1.227.000,00
    7. Biro Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp2.246.000,00
    8. Biro Umum sebesar Rp7.265.078,00
    9. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp3.098.600,00
    10. Dinas Kebudayaan sebesar Rp1.940.000,00
    11. Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.486.046,00
    12. Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp137.000,00
    13. Dinas Kesehatan sebesar Rp15.881.500,00
    14. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp8.528.861,00
    15. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.011.882,00
    16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp3.435.800,00
    17. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp809.800,00
    18. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp9.714.500,00
    19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp4.956.750,00
    20. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.531.411,00
    21. Dinas Pendidikan sebesar Rp17.909.829,00
    22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp6.243.100,00
    23. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.925.288,00
    24. Dinas Sosial sebesar Rp600.000,00
    25. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar Rp454.500,00
    26. Sekretariat DPRD sebesar Rp193.180.720,00

v. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp25.225.898.677,00 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.5.276 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**25.225.898.677,00**
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.985.778.977,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.240.119.700,00

Dengan rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.277 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per SKPD

NO	SKPD	BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT - LO TAHUN 2025	BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT - LO TAHUN 2024
1	Dinas Pendidikan	9.458.697.360,00	22.138.861.702,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	4.500.000,00
3	Dinas Sosial	433.000.000,00	1.299.000.000,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	30.000.000,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	22.000.000,00	0,00
6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	866.930.217,00	247.560.000,00
7	Dinas Kebudayaan	0,00	96.775.000,00
8	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	42.396.100,00	10.500.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2.003.400.000,00	4.008.000.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	0,00	25.750.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	91.950.000,00	184.100.000,00

NO	SKPD	BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT - LO TAHUN 2025	BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT - LO TAHUN 2024
12	Dinas Perhubungan	0,00	0,00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	11.400.000,00
14	Dinas Pariwisata	11.475.000,00	0,00
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00
16	Badan Pendapatan Daerah	332.850.000,00	0,00
17	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	0,00	0,00
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	60.000.000,00	0,00
19	Biro Kesejahteraan Rakyat	11.903.200.000,00	28.304.360.000,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	1.226.450.000,00
	Jumlah Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**25.225.898.677,00**	**57.587.256.702,00**

Apabila dibandingkan antara Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 7.5.278 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat -LRA dan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat -LO

URAIAN	BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT - LRA	BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT - LO	SELISIH
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**28.419.098.677,00**	**25.225.898.677,00**	**3.193.200.000,00**
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.987.278.977,00	4.985.778.977,00	1.500.000,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	23.431.819.700,00	20.240.119.700,00	3.191.700.000,00

Penjelasan selisih Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban

Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.279 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat -LRA dan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat -LO

URAIAN	BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT - LRA	PELUNASAN UTANG TAHUN 2024	BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT - LO
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**28.419.098.677,00**	**(3.193.200.000,00)**	**25.225.898.677,00**
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.987.278.977,00	(1.500.000,00)	4.985.778.977,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	23.431.819.700,00	(3.191.700.000,00)	20.240.119.700,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LRA dengan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO sebesar Rp3.193.200.000,00 adalah Pelunasan Utang Tahun 2024 pada beberapa OPD sebagai berikut:

1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp1.187.700.000,00
2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp2.004.000.000,00
3) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.500.000,00

vi. Beban Barang dan Jasa BOSP

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Barang dan Jasa BOSP dengan realisasi sebesar Rp118.720.230.654,84 rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.280 Rincian Beban Barang dan Jasa BOS – LO

URAIAN	BEBAN BARANG DAN JASA BOSP - LRA
Beban Barang dan Jasa BOSP	**118.720.230.654,84**
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	**118.720.230.654,84**
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	118.720.230.654,84

Beban Barang dan Jasa BOSP terdiri Beban Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana BOSP SMA/SMK/SLB Negeri dan juga Beban Barang dan Jasa yang bersumber dari

bantuan pemerintah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi antara lain:

1. Bantuan revitalisasi sekolah dan bantuan afirmasi Pendidikan menengah yang diterima oleh SMA/SLB Negeri; dan
2. Bantuan revitalisasi sekolah dan bantuan SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam yang diterima oleh SMK Negeri (SMK Non BLUD).

Apabila dibandingkan antara Belanja Barang dan Jasa BOSP dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Barang dan Jasa BOSP dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 7.5.281 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Barang dan Jasa BOSP-LRA dan Beban Barang dan Jasa BOSP-LO

URAIAN	BELANJA BARANG DAN JASA BOSP - LRA	BEBAN BARANG DAN JASA BOSP - LRA	SELISIH
Beban Barang dan Jasa BOSP	**113.061.921.817,84**	**118.720.230.654,84**	**(5.658.308.837,00)**
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	**113.061.921.817,84**	**118.720.230.654,84**	**(5.658.308.837,00)**
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	113.061.921.817,84	118.720.230.654,84	(5.658.308.837,00)

Penjelasan selisih Belanja Barang dan Jasa BOSP pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Barang dan Jasa BOSP pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.282 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Barang dan Jasa BOSP-LRA dan Beban Barang dan Jasa BOSP-LO

Uraian	Belanja Barang dan Jasa BOSP - LRA	Pembebanan Persediaan	Hibah Pemerintah Pusat	Aset Ekstrakomtabel yang bersumber dari Pengadaan BOS/Bantuan Pemerintah Pusat	Persediaan Akhir 2025	Kapitalisasi ke Aset Tetap	Koreksi Kelebihan Pembayaran	Beban Barang dan Jasa BOSP - LO
Beban Barang dan Jasa BOSP	**113.061.921.817,84**	**173.322.260,00**	**555.827.000,00**	**5.146.584.900,00**	**(10.916.822,00)**	**(143.721.098,00)**	**(62.787.403,00)**	**118.720.230.654,84**
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	**113.061.921.817,84**	**173.322.260,00**	**555.827.000,00**	**5.146.584.900,00**	**(10.916.822,00)**	**(143.721.098,00)**	**(62.787.403,00)**	**118.720.230.654,84**
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	113.061.921.817,84	173.322.260,00	555.827.000,00	5.146.584.900,00	(10.916.822,00)	(143.721.098,00)	(62.787.403,00)	118.720.230.654,84

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Barang dan Jasa BOSP - LRA dengan Beban Barang dan Jasa BOSP - LO sebagai berikut:

a. Penambahan Beban Barang dan Jasa BOSP terdiri dari :
   1. Penambahan dari Pembebanan Persediaan sebesar Rp173.322.260,00 terdiri dari:
      a) Pembebanan persediaan awal tahun 2025 yang bersumber dari dana BOS sebesar Rp154.535.783,00.
      b) Pembebanan persediaan BOS tahun 2024 yang berasal dari Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2024 pada SMKN 1 Tanjungpinang sebesar Rp18.786.477,00.
   2. Penambahan dari Hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp555.827.000,00 yang bersumber dari bantuan pemerintah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berupa bantuan revitalisasi sekolah dan bantuan afirmasi Pendidikan menengah yang diterima oleh SMA/SLB Negeri sebesar Rp356.400.000,00 dan bantuan revitalisasi sekolah dan bantuan SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam yang diterima oleh SMK Negeri (SMK Non BLUD) sebesar Rp199.427.000,00.
   3. Penambahan Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp5.146.584.900,00 terdiri dari:
      a) Aset Ekstrakomptabel atas pengadaan aset tetap yang bersumber dari dana BOSP yang diterima oleh SMA/SMK/SLB Negeri sebesar Rp4.001.753.322,00.
      b) Aset Ekstrakomptabel atas pengadaan aset tetap yang bersumber dari bantuan revitalisasi sekolah yang diterima oleh SMK Negeri Non BLUD sebesar Rp330.927.380,00.
      c) Aset Ekstrakomptabel atas pengadaan aset tetap yang bersumber dari bantuan revitalisasi sekolah yang diterima oleh SMA Negeri sebesar Rp773.718.500,00.
      d) Aset Ekstrakomptabel atas pengadaan aset tetap yang bersumber dari bantuan revitalisasi sekolah yang diterima oleh SLB Negeri sebesar Rp40.185.698,00.

b. Pengurangan Beban Barang dan Jasa BOSP terdiri dari :
   1. Pengurangan Beban Barang dan Jasa BOSP yang masih menjadi persediaan akhir 2025 sebesar Rp10.916.822,00, merupakan persediaan akhir alat tulis kantor sebesar Rp5.526.942,00, persediaan akhir perabot kantor sebesar Rp1.955.880,00, dan persediaan akhir alat listrik sebesar Rp3.434.000,00 berdasarkan *stock opname* per 31 Desember 2025 yang bersumber dari dana BOSP pada SMA/SMK Negeri.
   2. Pengurangan Beban Barang dan Jasa BOSP karena kapitalisasi ke aset tetap merupakan kapitalisasi atas belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana BOSP ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp143.721.098,00.
   3. Koreksi terkait Temuan BPK atas pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa BOSP sebesar Rp62.787.403,00 pada beberapa sekolah yang ada di Dinas Pendidikan antara lain:
      a) SMAN 2 Tanjungpinang sebesar Rp50.954.500,00
      b) SMAN 1 Batam sebesar Rp9.600.000,00
      c) SMKN 1 Tanjungpinang sebesar Rp2.232.903,00

vii. Beban Barang dan Jasa BLUD

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp131.576.276.829,58 rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.283 Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD

URAIAN	BEBAN BARANG DAN JASA BLUD - LO
Beban Barang dan Jasa BLUD	**131.576.276.829,58**
Beban Barang dan Jasa BLUD	**131.576.276.829,58**
Beban Barang dan Jasa BLUD	131.576.276.829,58

Beban Barang dan Jasa BLUD terdiri dari Beban Barang dan Jasa yang bersumber dari penerimaan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud serta Beban Barang dan Jasa pada SMK BLUD yang bersumber dari penerimaan BLUD SMK selain itu terdapat penerimaan yang bersumber dari bantuan pemerintah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meliputi bantuan revitalisasi sekolah, bantuan afirmasi Pendidikan menengah, bantuan sertifikasi, bantuan peningkatan mutu, bantuan SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam, serta bantuan dari PT Tenaris Hydril Batam.

Tabel 7.5.284 Beban Barang dan Jasa BLUD per SKPD

NO	SKPD	BEBAN BARANG DAN JASA BLUD 2025	BEBAN BARANG DAN JASA BLUD 2024
1	Dinas Pendidikan	6.520.111.172,63	17.898.788.806,90
2	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	18.300.365.392,00	21.106.503.474,99
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	106.755.800.264,95	113.303.599.988,20
	Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD	**131.576.276.829,58**	**152.308.892.270,09**

Apabila dibandingkan antara Belanja Barang dan Jasa BLUD dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Barang dan Jasa BLUD dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 7.5.285 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Barang dan Jasa BLUD-LRA dan Beban Barang dan Jasa BLUD-LO

URAIAN	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD - LRA	BEBAN BARANG DAN JASA BLUD - LO	SELISIH
Beban Barang dan Jasa BLUD	**130.190.841.269,56**	**131.576.276.829,58**	**(1.385.435.560,02)**
Beban Barang dan Jasa BLUD	**130.190.841.269,56**	**131.576.276.829,58**	**(1.385.435.560,02)**
Beban Barang dan Jasa BLUD	130.190.841.269,56	131.576.276.829,58	(1.385.435.560,02)

Penjelasan selisih Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Barang dan Jasa BLUD pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.286 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Barang dan Jasa BLUD -LRA dan Beban Barang dan Jasa BLUD-LO

URAIAN	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD - LRA	PELUNASAN UTANG TAHUN 2024	KAPITALISASI BEBAN KE ASET TETAP	KOREKSI KURANG CATAT KAPITALISASI BEBAN KE ASET GEDUNG DAN BANGUNAN	PERSEDIAAN AKHIR 2025	KOREKSI LEBIH CATAT UTANG TAHUN 2025	KOREKSI LEBIH CATAT BELANJA BERSUMBER DARI BANTUAN PEMERINTAH	PENGGUNAAN/ PEMBEBANAN PERSEDIAAN AWAL	ASET EKSTRAKOMPTABEL	PEMBEBANAN BEBAN SEWA DIBAYAR DIMUKA TAHUN 2024	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2025	BEBAN BARANG DAN JASA BLUD - LO
Beban Barang dan Jasa BLUD	**130.190.841.269,56**	**(19.355.371.259,00)**	**(144.955.994,00)**	**(148.740.000,00)**	**(19.059.671.149,42)**	**(900.000,00)**	**2.729.656.415,00**	**16.009.336.222,66**	**421.144.240,00**	**55.742.777,78**	**20.879.194.307,00**	**131.576.276.829,58**
Beban Barang dan Jasa BLUD	**130.190.841.269,56**	**(19.355.371.259,00)**	**(144.955.994,00)**	**(148.740.000,00)**	**(19.059.671.149,42)**	**(900.000,00)**	**2.729.656.415,00**	**16.009.336.222,66**	**421.144.240,00**	**55.742.777,78**	**20.879.194.307,00**	**131.576.276.829,58**
Beban Barang dan Jasa BLUD	130.190.841.269,56	(19.355.371.259,00)	(144.955.994,00)	(148.740.000,00)	(19.059.671.149,42)	(900.000,00)	2.729.656.415,00	16.009.336.222,66	421.144.240,00	55.742.777,78	20.879.194.307,00	131.576.276.829,58

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Barang dan Jasa BLUD-LRA dengan Beban Barang dan Jasa BLUD-LO sebagai berikut:

a. Penambahan Beban Barang dan Jasa BLUD terdiri dari :
    1. Penggunaan/Pembebanan Persediaan Awal sebesar Rp16.009.336.222,66 dengan rincian pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp12.861.579.699,20 dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp3.147.756.523,46
    2. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel pada SMK BLUD sebesar Rp421.144.240,00
    3. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2025 sebesar Rp20.879.194.307,00 dengan rincian pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp13.350.665.083,00 dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp7.528.529.224,00
    4. Pembebanan Beban Sewa Dibayar Dimuka Tahun 2024 pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp55.742.777,78
    5. Koreksi terkait lebih catat pengakuan Belanja Barang dan Jasa BLUD SMK yang bersumber dari Bantuan Pemerintah sebesar Rp2.729.656.415,00 pada Dinas Pendidikan
b. Pengurangan Beban Barang dan Jasa BLUD terdiri dari :
    1. Pelunasan Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2024 sebesar Rp19.355.371.259,00, dengan rincian pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp13.210.721.980,00 dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp6.144.649.279,00
    2. Kapitalisasi Beban Barang dan Jasa BLUD ke Aset Tetap sebesar Rp144.955.994,00 antara lain:
        a) Kapitalisasi Beban Barang dan Jasa BLUD ke Aset Gedung dan Bangunan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp95.000.000,00
        b) Kapitalisasi Beban Barang dan Jasa BLUD ke Aset Peralatan dan Mesin pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp49.955.994,00
    3. Persediaaan Akhir Tahun 2025 sebesar Rp19.059.671.149,42 dengan rincian Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp16.511.505.997,96 dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp2.512.478.191,46 serta SMK BLUD sebesar Rp35.686.960,00
    4. Koreksi terkait lebih catat pengakuan Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp900.000,00
    5. Koreksi terkait kurang catat kapitalisasi Beban Barang dan Jasa BLUD ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan SMKN 7 Batam pada Dinas Pendidikan sebesar Rp148.740.000,00

7.5.4.2.1.3 Beban Bunga

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak terdapat saldo Beban Bunga sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 7.5.287 Beban Bunga Tahun 2025

NO	SKPD	BEBAN BUNGA TAHUN 2025	BEBAN BUNGA TAHUN 2024
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	3.078.651.404,00
	Jumlah Beban Bunga	**0,00**	**3.078.651.404,00**

7.5.4.2.1.4 Beban Subsidi

Pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Subsidi sebesar Rp834.852.991,00 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.5.288 Rincian Beban Subsidi

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Subsidi	**834.852.991,00**
Beban Subsidi kepada BUMD	**834.852.991,00**
Beban Subsidi kepada BUMD	834.852.991,00

Pada tahun 2025 tidak terdapat perbedaan antara Belanja Subsidi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Subsidi pada Laporan Operasional (LO) yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.289 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Subsidi-LRA dan Beban Subsidi-LO

URAIAN	BELANJA SUBSIDI - LRA	BEBAN SUBSIDI - LO	SELISIH
Beban Subsidi	**834.852.991,00**	**834.852.991,00**	**0,00**
Beban Subsidi kepada BUMD	**834.852.991,00**	**834.852.991,00**	**0,00**
Beban Subsidi kepada BUMD	834.852.991,00	834.852.991,00	0,00

Dengan rincian Beban Subsidi menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.290 Beban Subsidi per SKPD Tahun 2025

NO	SKPD	BEBAN SUBSIDI TAHUN 2025	BEBAN SUBSIDI TAHUN 2024
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	834.852.991,00	944.301.180,00
	Jumlah Beban Hibah	**834.852.991,00**	**944.301.180,00**

7.5.4.2.1.5 Beban Hibah

Pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Hibah sebesar Rp182.120.444.655,37 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.5.291 Rincian Beban Hibah – LO

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Hibah	**182.120.444.655,37**
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	**18.917.435.429,00**
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	4.000.000.000,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	14.917.435.429,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	**24.607.233.400,37**
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	24.607.233.400,37
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	**94.626.109.960,00**
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	26.662.171.939,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	47.339.739.934,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	19.667.872.087,00
Beban Hibah kepada Koperasi	950.000.000,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.326.000,00
Beban Hibah Dana BOS	**38.653.058.866,00**
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	33.716.349.341,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	4.936.709.525,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	**5.119.230.000,00**
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.119.230.000,00
Beban Hibah kepada Usaha Mikro	**197.377.000,00**
Beban Hibah Barang kepada Usaha Mikro	197.377.000,00

Dengan rincian Beban Hibah menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.292 Beban Hibah per SKPD Tahun 2025

NO	SKPD	BEBAN HIBAH TAHUN 2025	BEBAN HIBAH TAHUN 2024
1	Dinas Pendidikan	48.457.043.355,00	40.498.534.166,09
2	Dinas Kesehatan	1.298.270.460,00	1.675.821.560,00

NO	SKPD	BEBAN HIBAH TAHUN 2025	BEBAN HIBAH TAHUN 2024
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	11.155.461.642,00	0,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.050.930.000,00	159.928.792.986,00
5	Dinas Sosial	455.000.000,00	565.000.000,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	560.000.000,00	700.000.000,00
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.760.000.000,00	2.270.000.000,00
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10.753.324.685,00	17.849.922.178,00
9	Dinas Kebudayaan	1.500.000.000,00	1.462.750.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	200.000.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	90.000.000,00	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80.000.000,00	175.000.000,00
13	Dinas Perhubungan	15.481.728.400,37	924.800.000,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.067.941.063,00	10.661.700.891,94
15	Dinas Pariwisata	368.635.600,00	0,00
16	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.111.447.387,00	0,00
17	Biro Kesejahteraan Rakyat	44.560.156.275,00	101.136.180.322,00
18	Biro Umum	14.370.505.788,00	15.801.952.600,00
	Jumlah Beban Hibah	**182.120.444.655,37**	**353.850.454.704,03**

Apabila dibandingkan antara Belanja Hibah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Hibah dalam Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 7.5.293 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Hibah-LRA dan Beban Hibah-LO

URAIAN	BELANJA HIBAH - LRA	BEBAN HIBAH - LO	SELISIH
Beban Hibah	**165.767.273.907,96**	**182.120.444.655,37**	**(16.353.170.747,41)**
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	**19.752.937.062,67**	**18.917.435.429,00**	**835.501.633,67**
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	15.752.937.062,67	14.917.435.429,00	835.501.633,67
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	**0,00**	**24.607.233.400,37**	**(24.607.233.400,37)**
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	24.607.233.400,37	(24.607.233.400,37)
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	**102.242.047.979,29**	**94.626.109.960,00**	**7.615.938.019,29**
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27.146.607.739,00	26.662.171.939,00	484.435.800,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	47.939.194.434,00	47.339.739.934,00	599.454.500,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	26.206.245.806,29	19.667.872.087,00	6.538.373.719,29

URAIAN	BELANJA HIBAH - LRA	BEBAN HIBAH - LO	SELISIH
Beban Hibah kepada Koperasi	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	6.326.000,00	(6.326.000,00)
Beban Hibah Dana BOS	**38.653.058.866,00**	**38.653.058.866,00**	**0,00**
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	33.716.349.341,00	33.716.349.341,00	0,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	4.936.709.525,00	4.936.709.525,00	0,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	**5.119.230.000,00**	**5.119.230.000,00**	**0,00**
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.119.230.000,00	5.119.230.000,00	0,00
Beban Hibah kepada Usaha Mikro	**0,00**	**197.377.000,00**	**(197.377.000,00)**
Beban Hibah Barang kepada Usaha Mikro	0,00	197.377.000,00	(197.377.000,00)

Penjelasan selisih Belanja Hibah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Hibah pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.294 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Hibah-LRA dan Beban Hibah-LO

URAIAN	BELANJA HIBAH - LRA	PELUNASAN UTANG 2024	REKLASIFIKASI KE PERSEDIAAN	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2025	PENGHAPUSAN ASET TETAP TANAH	PENGHAPUSAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	PENGHAPUSAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN	PENGHAPUSAN ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PENGHAPUSAN ASET LAINNYA	BEBAN HIBAH - LO
Beban Hibah	**165.767.273.907,96**	**(13.811.458.307,29)**	**(6.938.153.600,00)**	**5.374.500.325,33**	**15.541.752.478,00**	**197.377.000,00**	**12.806.726.625,37**	**2.573.917.226,00**	**608.509.000,00**	**182.120.444.655,37**
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	**19.752.937.062,67**	**(5.916.015.360,00)**	**(6.938.153.600,00)**	**5.101.321.397,33**	**6.917.345.929,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.917.435.429,00**
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	15.752.937.062,67	(5.916.015.360,00)	(6.938.153.600,00)	5.101.321.397,33	6.917.345.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.917.435.429,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.618.080.549,00**	**0,00**	**12.806.726.625,37**	**2.573.917.226,00**	**608.509.000,00**	**24.607.233.400,37**
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	8.618.080.549,00	0,00	12.806.726.625,37	2.573.917.226,00	608.509.000,00	24.607.233.400,37
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	**102.242.047.979,29**	**(7.895.442.947,29)**	**0,00**	**273.178.928,00**	**6.326.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.626.109.960,00**
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27.146.607.739,00	(484.435.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.662.171.939,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	47.939.194.434,00	(599.454.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.339.739.934,00

URAIAN	BELANJA HIBAH - LRA	PELUNASAN UTANG 2024	REKLASIFIKASI KE PERSEDIAAN	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2025	PENGHAPUSAN ASET TETAP TANAH	PENGHAPUSAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	PENGHAPUSAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN	PENGHAPUSAN ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PENGHAPUSAN ASET LAINNYA	BEBAN HIBAH - LO
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	26.206.245.806,29	(6.811.552.647,29)	0,00	273.178.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.667.872.087,00
Beban Hibah kepada Koperasi	950.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000.000,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	6.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.326.000,00
Beban Hibah Dana BOS	**38.653.058.866,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.653.058.866,00**
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	33.716.349.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.716.349.341,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	4.936.709.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936.709.525,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	**5.119.230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.119.230.000,00**
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.119.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119.230.000,00
Beban Hibah kepada Usaha Mikro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.377.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.377.000,00**
Beban Hibah Barang kepada Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.377.000,00	0,00	0,00	0,00	197.377.000,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Hibah-LRA dengan Beban Hibah-LO sebagai berikut:

a. Penambahan Beban Hibah terdiri dari:
    1. Penambahan Utang Belanja Hibah Tahun 2025 sebesar Rp5.374.500.325,33 pada beberapa OPD sebagai berikut:
        a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp1.972.700.000,00
        b) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp273.178.928,00
        c) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp3.128.621.397,33
    2. Penambahan Beban Hibah atas Penghapusan Aset Tetap Tanah sebesar Rp15.541.752.478,00 antara lain:
        a) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.846.447.387,00
        b) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp10.960.584.942,00
        c) Dinas Perhubungan sebesar Rp734.720.149,00
    3. Penambahan Beban Hibah atas Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp197.377.000,00
    4. Penambahan Beban Hibah atas Penghapusan Aset Tetap Gdung dan Bangunan sebesar Rp12.806.726.625,37 antara lain:
        a) Dinas Perhubungan sebesar Rp12.173.091.025,37
        b) Dinas Pariwisata sebesar Rp368.635.600,00
        c) Badan Keuangan dan Aset Daerah Rp265.000.000,00
    5. Penambahan Beban Hibah atas Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp2.573.917.226,00
    6. Penambahan Bebah Hibah atas Penghapusan karena Aset Rusak Berat/Usang pada Biro Umum sebesar Rp608.509.000,00
b. Pengurangan Beban Hibah terdiri dari:
    1. Pelunasan Utang Belanja Hibah Tahun 2024 sebesar Rp13.811.458.307,29 pada beberapa OPD sebagai berikut:
        a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp2.492.700.000,00
        b) Biro Umum sebesar Rp4.487.200.000,00
        c) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp119.028.000,00
        d) Dinas Kesehatan sebesar Rp975.821.560,00
        e) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp4.811.908.747,29
        f) Dinas Perhubungan sebesar Rp924.800.000,00
    2. Reklasifikasi dari Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat ke Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp6.938.153.600,00

7.5.4.2.1.6 Beban Bantuan Sosial

Pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Bantuan Sosial sebesar Rp1.834.940.000,00 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 7.5.295 Uraian Beban Bantuan Sosial – LO

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Bantuan Sosial	**1.834.940.000,00**
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	**1.834.940.000,00**
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.834.940.000,00
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00

Dengan rincian Beban Bantuan Sosial menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.296 Beban Bantuan Sosial per SKPD Tahun 2025

NO	SKPD	BEBAN BANTUAN SOSIAL TAHUN 2025	BEBAN BANTUAN SOSIAL TAHUN 2024
1	Dinas Pendidikan	0,00	2.972.600.000,00
2	Dinas Sosial	1.834.940.000,00	1.030.325.000,00
	Jumlah Beban Bantuan Sosial	**1.834.940.000,00**	**4.002.925.000,00**

Pada tahun 2025 tidak terdapat perbedaan antara Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Bantuan Sosial pada Laporan Operasional (LO).

Tabel 7.5.297 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Bantuan Sosial-LRA dan Beban Bantuan Sosial-LO

URAIAN	BELANJA BANTUAN SOSIAL - LRA	BEBAN BANTUAN SOSIAL - LO	SELISIH
Beban Bantuan Sosial	**1.834.940.000,00**	**1.834.940.000,00**	**0,00**
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	0,00	0,00	**0,00**
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	**1.834.940.000,00**	**1.834.940.000,00**	**0,00**

URAIAN	BELANJA BANTUAN SOSIAL - LRA	BEBAN BANTUAN SOSIAL - LO	SELISIH
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.834.940.000,00	1.834.940.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	**0,00**
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00

7.5.4.2.1.7 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Pada Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp1.150.870.424,67 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.5.298 Beban Penyisihan Piutang per SKPD

NO	SKPD	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAHUN 2025	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAHUN 2024
1	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	77.481.172,22	444.921.130,65
2	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	594.141,88	1.715.523,77
3	Badan Pendapatan Daerah	1.023.066.627,68	24.217.027.664,89
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	49.522.200,00	3.951.550,00
5	Dinas Perhubungan	206.282,89	199.538,19
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang	**1.150.870.424,67**	**24.667.815.407,50**

7.5.4.2.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tetap sebesar Rp378.279.897.533,32 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 7.5.299 Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD tahun 2025

NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TAHUN 2025	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TAHUN 2024
1	Dinas Pendidikan	93.387.323.691,57	88.078.263.073,16
2	Dinas Kesehatan	1.522.361.810,96	1.670.421.242,83
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	35.851.282.327,00	37.634.379.099,73

NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TAHUN 2025	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TAHUN 2024
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	11.600.455.090,91	11.846.894.409,60
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	156.199.154.656,04	156.727.594.573,86
6	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	1.029.624.681,10	15.426.170.125,58
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	545.740.906,34	1.021.447.478,73
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	606.342.215,91	622.040.634,73
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	351.442.417,85	597.749.416,96
10	Dinas Sosial	382.021.136,33	439.752.850,40
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	370.041.469,65	208.956.389,60
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.346.528.431,31	1.588.044.235,89
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	213.740.431,17	251.569.572,61
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	472.389.156,14	681.456.755,35
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.932.629.368,94	2.102.453.162,33
16	Dinas Kebudayaan	2.370.679.489,67	1.989.303.518,63
17	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	902.376.879,82	629.933.690,22
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	343.396.672,88	306.832.871,05
19	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	3.664.523.783,39	3.688.558.580,62
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	770.925.833,09	729.445.777,04
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	399.189.264,39	433.220.796,21
22	Dinas Perhubungan	18.510.804.207,47	23.025.113.828,45
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.208.035.231,80	4.283.126.710,67
24	Dinas Pariwisata	416.212.775,69	509.665.773,80
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.937.085.103,23	7.532.529.534,96
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	615.042.048,12	568.958.380,26
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	214.648.912,20	214.648.912,23
28	Inspektorat	1.352.301.669,35	1.205.636.961,75
29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	842.672.408,64	1.073.081.482,77
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.022.269.183,81	3.142.288.867,28
31	Badan Pendapatan Daerah	5.410.437.993,34	5.588.364.431,54
32	Badan Kepegawaian dan Korpri	439.541.257,71	477.005.689,45
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	727.177.789,02	708.234.408,10
34	Sekretariat DPRD	5.150.403.124,31	3.492.531.282,71
35	Badan Penghubung Daerah	2.624.032.798,80	2.364.611.045,76
36	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	127.021.275,97	125.251.480,67
37	Biro Kesejahteraan Rakyat	2.603.253.809,70	487.734.516,45
38	Biro Pengadaan Barang/Jasa	295.389.696,02	417.678.489,06

NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TAHUN 2025	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI TAHUN 2024
39	Biro Perekonomian dan Pembangunan	136.161.385,71	198.904.484,71
40	Biro Organisasi	164.712.920,00	126.946.819,33
41	Biro Administrasi Pimpinan	401.800.540,14	486.710.877,61
42	Biro Umum	8.752.491.585,95	8.859.650.065,37
43	Biro Hukum	66.232.101,88	47.187.407,42
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**378.279.897.533,32**	**391.610.349.705,48**

7.5.4.2.3. Beban Transfer

Beban Transfer merupakan pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lainnya, yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Transfer sebesar Rp538.410.613.886,00, realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp285.077.604.992,00 atau sebesar 34,62% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp823.488.218.878,00. Rincian Beban Transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.4.2.3.1 Beban Bagi Hasil

Beban Bagi Hasil merupakan kewajiban pengeluaran kas dari suatu entitas pelaporan pemerintah kepada entitas pelaporan lain atau pemerintah daerah lain, yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Beban bagi hasil diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas. Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Bagi Hasil sebesar Rp525.174.135.186,00 dengan rincian:

Tabel 7.5.300 Beban Bagi Hasil – LO

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Bagi Hasil	**525.174.135.186,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	**525.174.135.186,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	**224.799.671.232,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	224.799.671.232,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	**300.374.463.954,00**

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	**300.374.463.954,00**

Apabila dibandingkan antara Belanja Bagi Hasil pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Bagi Hasil pada Laporan Operasional (LO) maka terdapat perbedaan sebagai berikut:

Tabel 7.5.301 Rincian Selisih Perbedaan Belanja Bagi Hasil-LRA dan Beban Bagi Hasil-LO

URAIAN	BELANJA BAGI HASIL - LRA	BEBAN BAGI HASIL - LO	SELISIH
Beban Bagi Hasil	**690.951.951.944,00**	**525.174.135.186,00**	**165.777.816.758,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	**690.951.951.944,00**	**525.174.135.186,00**	**165.777.816.758,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	**293.134.575.850,00**	**224.799.671.232,00**	**68.334.904.618,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	293.134.575.850,00	224.799.671.232,00	68.334.904.618,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	**397.817.376.094,00**	**300.374.463.954,00**	**97.442.912.140,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	397.817.376.094,00	300.374.463.954,00	97.442.912.140,00

Penjelasan selisih Belanja Bagi Hasil pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Bagi Hasil pada Laporan Operasional (LO) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.302 Penjelasan Rincian Selisih Perbedaan Belanja Bagi Hasil -LRA dan Beban Bagi Hasil -LO

URAIAN	BELANJA BAGI HASIL - LRA	PENETAPAN UTANG 2025	PELUNASAN UTANG 2024	BEBAN BAGI HASIL - LO
Beban Bagi Hasil	**690.951.951.944,00**	**60.698.875.497,00**	**(226.476.692.255,00)**	**525.174.135.186,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	**690.951.951.944,00**	**60.698.875.497,00**	**(226.476.692.255,00)**	**525.174.135.186,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	**293.134.575.850,00**	**22.949.282.668,00**	**(91.284.187.286,00)**	**224.799.671.232,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	293.134.575.850,00	22.949.282.668,00	(91.284.187.286,00)	224.799.671.232,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	**397.817.376.094,00**	**37.749.592.829,00**	**(135.192.504.969,00)**	**300.374.463.954,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	397.817.376.094,00	37.749.592.829,00	(135.192.504.969,00)	300.374.463.954,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan selisih antara Belanja Bagi Hasil - LRA dengan Beban Bagi Hasil-LO sebagai berikut:

a. Penambahan Beban Bagi Hasil berasal dari Penetapan Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2025 antara lain:
   1. Pemerintah Kota Batam sebesar Rp31.300.236.315,00
   2. Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp6.449.356.514,00
   3. Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar Rp5.030.113.428,00
   4. Pemerintah Kabupeten Karimun sebesar Rp5.776.071.233,00
   5. Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp4.643.276.362,00
   6. Pemerintah Kabupaten Lingga sebesar Rp3.772.603.929,00
   7. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp3.727.217.716,00

b. Pengurangan Beban Bagi Hasil berasal dari pelunasan Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2024 antara lain:
   1. Pemerintah Kota Batam sebesar Rp108.774.500.374,00
   2. Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp26.418.004.595,00
   3. Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar Rp21.684.975.192,00
   4. Pemerintah Kabupeten Karimun sebesar Rp21.289.602.585,00
   5. Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp17.546.888.639,00
   6. Pemerintah Kabupaten Lingga sebesar Rp15.645.671.052,00
   7. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp15.117.049.818,00

7.5.4.2.3.2 Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan diberikan kepada pemerintah kab/kota dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi/atau penerima bantuan keuangan. Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Bantuan Keuangan sebesar Rp13.236.478.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.303 Beban Bantuan Keuangan – LO

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Bantuan Keuangan	**13.236.478.700,00**
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	**1.500.000.000,00**
Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	**1.500.000.000,00**
Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	1.500.000.000,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	**4.027.313.100,00**
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	**4.027.313.100,00**
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	4.027.313.100,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	**7.709.165.600,00**

URAIAN	LAPORAN OPERASIONAL
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	**7.709.165.600,00**
Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	7.709.165.600,00

Pada tahun 2025 tidak terdapat perbedaan antara Belanja Bantuan Keuangan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Bantuan Keuangan pada Laporan Operasional (LO).

Tabel 7.5.304 Selisih Perbedaan Belanja Bantuan Keuangan - LRA dan Beban Bantuan Keuangan – LO

URAIAN	BELANJA BANTUAN KEUANGAN - LRA	BEBAN BANTUAN KEUANGAN - LO	SELISIH
Beban Bantuan Keuangan	**13.236.478.700,00**	**13.236.478.700,00**	**0,00**
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**0,00**
Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**0,00**
Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	**4.027.313.100,00**	**4.027.313.100,00**	**0,00**
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	**4.027.313.100,00**	**4.027.313.100,00**	**0,00**
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	4.027.313.100,00	4.027.313.100,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	**7.709.165.600,00**	**7.709.165.600,00**	**0,00**
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	**7.709.165.600,00**	**7.709.165.600,00**	**0,00**
Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	7.709.165.600,00	7.709.165.600,00	0,00

7.5.4.2.4. Defisit Kegiatan Non Operasional

Defisit Kegiatan Non Operasional	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	(18.275.061.807,00)	**(39.000.172.538,89)**

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan dikelompokkan dalam kegiatan non operasional.

Pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp(18.275.061.807,00). Saldo tersebut merupakan

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO yang digunakan untuk mengakui aset non lancar yang dieliminasi dari neraca sebagai akibat penjualan, pertukaran, hibah, pemusnahan, kehilangan, pencurian, atau sebab lain yang mengakibatkan aset tidak lagi dikuasai dan/atau tidak lagi memberikan manfaat ekonomi maupun manfaat sosial bagi pemerintah daerah.

7.5.4.2.5. Beban Luar Biasa

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak terdapat saldo Beban Luar Biasa sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 7.5.305 Beban Luar Biasa Tahun 2025

NO	SKPD	BEBAN LUAR BIASA TAHUN 2025	BEBAN LUAR BIASA TAHUN 2024
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	2.065.423.140,00
	Jumlah Beban Luar Biasa	**0,00**	**2.065.423.140,00**

7.5.4.2.6. Surplus/Defisit Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	0,00	**(2.065.423.140,00)**

Surplus/Defisit Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pos Luar Biasa - LO diakui pada saat hak atas pendapatan pos luar biasa timbul akibat ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali. Pada Tahun 2025 tidak terdapat saldo Pendapatan Luar Biasa dan Defisit Pos Luar Biasa.

7.5.4.3. Surplus/Defisit - LO

Defisit- LO	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	(72.434.959.518,69)	**(303.759.392.886,40)**

Surplus/Defisit - LO digunakan untuk mencatat jumlah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat saldo defisit - LO sebesar Rp(72.434.959.518,69)

7.5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

7.5.5.1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

7.5.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Operasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	3.200.402.889.189,89	**3.604.366.696.276,70**

Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025 sebesar Rp3.200.402.889.189,89 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.306 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Operasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	1.447.285.058.158,50	1.777.704.385.140,00
Penerimaan Retribusi Daerah	7.171.631.839,00	10.634.618.841,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.275.536.541,00	1.904.909.335,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	109.396.440.389,82	30.108.755.601,70
Penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.632.475.378.327,00	1.782.713.495.768,00
Penerimaan Hibah	1.798.843.934,57	1.300.531.591,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**3.200.402.889.189,89**	**3.604.366.696.276,70**

7.5.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Operasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	3.024.572.875.128,98	**3.454.951.185.226,53**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2025 sebesar Rp3.024.572.875.128,98 terdiri dari:

Tabel 7.5.307 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	1.271.931.959.380,04	1.288.605.047.897,00
Pembayaran Barang dan Jasa	918.668.477.071,98	1.059.785.418.421,26
Pembayaran Bunga	0,00	3.692.560.273,00
Pembayaran Subsidi	834.852.991,00	944.301.180,00
Pembayaran Hibah	127.114.215.041,96	320.711.308.300,27
Pembayaran Bantuan Sosial	1.834.940.000,00	4.002.925.000,00
Pembayaran Tak Terduga	0,00	2.065.423.140,00
Pembayaran Bagi Hasil	690.951.951.944,00	748.291.201.015,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	13.236.478.700,00	26.853.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**3.024.572.875.128,98**	**3.454.951.185.226,53**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp175.830.014.060,91. Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	175.830.014.060,91	**149.415.511.050,17**

7.5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset Non-Keuangan lainnya.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

7.5.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	512.084.414,00	**0,00**

Arus Masuk Kas dari aktivitas investasi selama Tahun 2025 Sebesar Rp512.084.414,00 merupakan penerimaan kas dari penjualan aset tetap berupa hasil penjualan peralatan dan mesin, hasil penjualan aset lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.308 Arus Masuk Kas dari aktivitas investasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	69.710.000,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lain-lain	442.374.414,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**512.084.414,00**	**0,00**

7.5.5.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	185.115.613.606,16	**244.970.648.614,02**

Arus Keluar Kas dari aktivitas investasi selama tahun 2025 sebesar Rp185.115.613.606,16 merupakan pengeluaran uang untuk memperoleh aset tetap berupa: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya (berupa aset tidak berwujud), dan aset lainnya serta penyertaan modal pemerintah daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.309 Arus Keluar Kas dari aktivitas investasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	992.100.000,00	920.100.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	51.562.817.179,00	76.496.084.204,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	80.799.961.394,06	129.103.961.833,55
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	46.310.371.998,10	36.791.762.576,47
Perolehan Aset Tetap Lainnya	329.702.535,00	1.658.740.000,00
Perolehan Aset Lainnya	120.660.500,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**185.115.613.606,16**	**244.970.648.614,02**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah Rp(184.603.529.192,16). Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	(184.603.529.192,16)	(244.970.648.614,02)

7.5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah daerah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

Arus Kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

7.5.5.3.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas pendanaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	82.836.000,00	100.883.708,00

Arus Masuk Kas dari aktivitas pendanaan selama tahun 2025 sebesar Rp82.836.000,00 merupakan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dana bergulir, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.310 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Pendanaan

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	82.836.000,00	100.883.708,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**82.836.000,00**	**100.883.708,00**

7.5.5.3.2. Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas pendanaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	0,00	91.945.787.633,00

Arus Keluar Kas dari aktivitas pendanaan selama Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.311 Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Pendanaan

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah	0,00	91.945.787.633,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**0,00**	**91.945.787.633,00**

Arus Kas Bersih dari aktivitas pendanaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp82.836.000,00. Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2025 dan 2024 adalah:

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas pendanaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	82.836.000,00	**(91.844.903.925,00)**

7.5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah daerah.

7.5.5.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	216.693.614.064,38	**212.531.012.053,25**

Arus Masuk Kas dari aktivitas Transitoris selama tahun 2025 sebesar Rp216.693.614.064,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.312 Arus Masuk Kas dari aktivitas Transitoris

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	216.670.872.859,00	212.522.600.526,00
UYHD Tahun 2024	19.041.006,00	3.738.300,00
Pengembalian Jasa Giro Kas Lainnya Tahun 2024	236.913,06	2.941.227,25
Pengembalian Kas dari Bendahara Penerimaan	0,00	1.732.000,00
Pengembalian Dana SPP dari Kas BLUD	3.463.286,32	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**216.693.614.064,38**	**212.531.012.053,25**

7.5.5.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	216.949.130.421,00	**212.541.878.445,06**

Arus Keluar Kas dari aktivitas Transitoris selama tahun 2025 sebesar Rp216.949.130.421,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.313 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitor		
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	216.637.000.791,00	212.522.600.526,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jasa Giro Kas Lainnya	520.089,00	236.913,06
UYHD Tahun 2025	311.609.541,00	19.041.006,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**216.949.130.421,00**	**212.541.878.445,06**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris adalah Rp(255.516.356,62) Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	(255.516.356,62)	**(10.866.391,81)**

7.5.5.5. Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih Selama Periode 2025

Kenaikan/(penurunan) Kas Bersih Selama Periode Tahun 2025 merupakan akumulasi jumlah kenaikan/(penurunan) kas bersih dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris.

Selama Tahun Anggaran 2025 terjadi penurunan kas bersih sebesar Rp(8.946.195.487,87) yang terdiri dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp175.830.014.060,91, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp(184.603.529.192,16), Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp82.836.000,00 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp(255.516.356,62). Perbandingan Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih tahun 2025 dan 2024 adalah:

Kenaikan/ (Penurunan) Kas Bersih	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	(8.946.195.487,87)	**(187.410.907.880,66)**

Penurunan Kas Bersih sebesar Rp178.464.712.392,79 atau sebesar 95,23% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp187.410.907.880,66 dipengaruhi oleh pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjaman daerah kepada PT. SMI pada tahun sebelumnya serta optimalisasi penyerapan belanja daerah yang diselaraskan dengan ketersediaan kas yang ada pada Rekening Kas Umum Daerah.

7.5.5.6. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025

Saldo akhir kas per 31 Desember 2025 merupakan perhitungan Saldo Awal per 1 Januari 2025 ditambah (dikurangi) dengan kenaikan (penurunan) kas bersih selama periode tahun 2025.

Saldo akhir kas di BUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.356.745.416,90 didapat dari perhitungan saldo awal sebesar Rp23.302.940.904,77 ditambah penurunan kas bersih selama periode tahun 2025 sebesar Rp(8.946.195.487,87).

Total Saldo Kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.356.640.775,93 dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo Akhir Kas di BUD	14.356.745.416,90
- Kas di Bendahara Pengeluaran	311.609.541,00
- Kas di BLUD	2.499.584.868,03
- Kas Lainnya	201.711.431,00
- Kas Dana BOSP	1.986.989.519,00
Saldo Akhir Kas	**19.356.640.775,93**

Perbandingan Saldo Akhir Kas 2025 dan 2024 adalah:

Saldo Akhir Kas	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	19.356.640.775,93	**27.810.220.201,59**

7.5.6. Penjelasan Atas Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

a) Ekuitas awal;
b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
   1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
   2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas akhir

7.5.6.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	6.454.280.263.239,55	**6.764.055.547.180,37**

Pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat ekuitas awal sebesar Rp6.454.280.263.239,55 yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada laporan Tahun 2024. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jumlah Aset Tahun 2024	7.105.534.873.977,98
- Jumlah Kewajiban Tahun 2024	651.254.610.738,43
Saldo Awal Ekuitas 2025	**6.454.280.263.239,55**

7.5.6.2. Surplus/Defisit– LO

Defisit LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	(72.434.959.518,69)	**(303.759.392.886,40)**

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dalam Laporan Operasional Tahun 2025 tercatat sebesar Rp(72.434.959.518,69).

7.5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Pada tahun 2025 Koreksi kesalahan nilai persediaan tercatat sebesar Rp136.050.877,00 dan lain-lain sebesar Rp23.971.350.864,72 yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Koreksi Nilai Persediaan

   Koreksi nilai persediaan pada tahun 2025 sebesar Rp136.050.877,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.314 Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3
Dinas Pendidikan	18.786.477,00	Merupakan koreksi tambah persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp5.218.413,00, persediaan Kertas dan Cover sebesar Rp304.014,00, persediaan Bahan Komputer sebesar Rp6.985.230,00, persediaan Perabot Kantor sebesar Rp428.120,00 dan persediaan Alat Listrik sebesar Rp5.850.700,00 yang bersumber dari Dana BOS dan merupakan temuan pemeriksaan BPK tahun 2024 pada SMK Negeri 1 Tanjungpinang.
Dinas Kelautan dan Perikanan	117.264.400,00	Merupakan koreksi tambah persediaan dari hasil pembibitan ikan berupa bibit ternak/bibit ikan kerapu macan ukuran 4 - 5cm sebanyak 9.358 ekor dengan harga satuan Rp6.000,00 serta persediaan indukan ikan kerapu putih aktif sebanyak 11 ekor dengan harga satuan Rp100.000,00, persediaan calon induk kakap

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3
		putih sebanyak 74 ekor dengan harga satuan Rp100.000,00, persediaan indukan kakap putih hampir afkir sebanyak 35 ekor dengan harga satuan Rp100.000,00, persediaan bibit ternak/bibit ikan kerapu putih ukuran 6 - 7cm sebanyak 364 ekor dengan harga satuan Rp3.600,00, persediaan bibit ternak/bibit ikan kerapu putih ukuran 8 - 9cm sebanyak 1.100 ekor dengan harga satuan Rp4.800,00, dan persediaan bibit ternak/bibit ikan kerapu putih ukuran 10 - 12cm sebanyak 5.508 ekor dengan harga satuan Rp6.000,00
Total	**136.050.877,00**	

2. Lain-lain sebesar Rp23.971.350.864,72 dapat dijelaskan sebagai berikut:

   a. Koreksi Kas di BLUD

   Koreksi kas di BLUD pada tahun 2025 sebesar Rp(77.524.310,00) dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.315 Rincian Koreksi Kas di BLUD

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3
Dinas Pendidikan	7.648.000,00	Koreksi Tambah : Merupakan koreksi tambah saldo awal Kas di BLUD karena perubahan status sekolah menjadi BLUD pada SMK Negeri Kundur sebesar Rp5.700.000,00 dan SMK Negeri 1 Bintan Timur sebesar Rp1.948.000,00.
	(85.172.310,00)	Koreksi Kurang : Merupakan koreksi kurang saldo awal Kas di BLUD karena terdapat pengembalian kas BLUD yang merupakan kas SPP yang sejak tahun 2024 tidak dipungut lagi ke wali murid pada SMK Negeri 2 Batam sebesar Rp24.401.924,00 dan SMK Negeri 1 Batam sebesar Rp631.786,00 selain itu terdapat pengembalian ke kas negara atas bantuan pemerintah pusat pada SMK Negeri 1 Batam sebesar Rp40.200.000,00 dan pengembalian bantuan personil untuk siswa yang melaksanakan praktek kerja lapangan ke kas daerah sebesar Rp19.938.600,00 pada SMK Negeri 1 Batam.
Total	**(77.524.310,00)**	

   b. Koreksi Kas Lainnya

   Koreksi Kas Lainnya tahun 2025 sebesar Rp(194.475.239,17) merupakan koreksi kurang atas sisa kas SPP yang sejak tahun 2024 tidak dipungut lagi pada Kas Lainnya SMA/SMK/SLB Negeri di Provinsi Kepulauan Riau yang setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan atas saldo Kas Lainnya, sisa kas tersebut telah dilakukan pengembalian ke orang tua siswa.

   c. Koreksi Piutang Pajak Daerah

   Koreksi Piutang Pajak Daerah sebesar Rp529.071.745,68 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.316 Rincian Koreksi Piutang Pajak Daerah

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3
Badan Pendapatan Daerah	993.392.798,68	Koreksi Tambah : Merupakan koreksi tambah saldo awal Piutang Pendapatan Pajak Daerah dari hasil pemeriksaan BPK dengan tujuan tertentu

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3
		tahun 2024 atas pendapatan daerah berupa Piutang Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp227.908.858,43, Piutang Alat Berat sebesar Rp303.715.000,00, dan Piutang Air Permukaan sebesar Rp461.768.940,25.
	(464.321.053,00)	Koreksi Kurang : Merupakan koreksi kurang saldo awal Piutang Pendapatan Pajak Daerah atas kompensasi lebih bayar pelunasan Piutang Air Permukaan sebesar Rp369.020.653,00 dan koreksi kurang Piutang Pendapatan Pajak PKB dan BBNKB sebesar Rp95.300.400,00 karena adanya program pemutihan dan diskon pajak atas pembayaran pajak yang jatuh tempo di bawah tahun 2025.
Total	**529.071.745,68**	

d. Koreksi Piutang Retribusi Daerah

Koreksi Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp(462.800,00) merupakan koreksi kurang Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan atas pembebanan biaya administrasi dalam pembayaran piutang oleh rekanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib sebesar Rp(423.800,00) dan Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp(39.000,00).

e. Koreksi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Koreksi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp(18.314.400,00) dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.317 Rincian Koreksi Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3
Badan Pendapatan Daerah	4.483.500,00	Koreksi Tambah : Merupakan koreksi tambah saldo awal Piutang Pendapatan Denda PKB sebesar Rp1.645.600,00 dan Piutang Pendapatan Denda BBNKB sebesar Rp2.837.900,00 atas penambahan bunga denda
	(22.797.900,00)	Koreksi Kurang : Merupakan koreksi kurang saldo awal Piutang Pendapatan Denda PKB sebesar Rp(22.730.500,00) dan Piutang Pendapatan Denda BBNKB sebesar Rp(67.400,00) atas program pemutihan dan diskon denda pajak atas pembayaran pajak yang jatuh tempo di bawah tahun 2025.
Total	**(18.314.400,00)**	

f. Koreksi Penyisihan Piutang

Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp48.301.516.011,51 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.318 Rincian Koreksi Penyisihan Piutang

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3
Badan Pendapatan Daerah	48.258.505.767,53	Merupakan koreksi tambah atas pengurangan Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak Daerah tahun 2024 sebesar Rp48.258.505.767,53 karena pelunasan.

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3
Dinas Perhubungan	199.538,19	Merupakan koreksi tambah atas pengurangan Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi – Pelayanan Kepelabuhanan tahun 2024 sebesar Rp199.538,19 karena pelunasan.
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	41.282.085,63	Merupakan koreksi tambah atas pengurangan Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi – Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2024 sebesar Rp41.282.085,63 karena pelunasan.
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	1.528.620,16	Merupakan koreksi tambah atas pengurangan Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi – Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2024 sebesar Rp1.528.620,16 karena pelunasan.
Total	**48.301.516.011,51**	

g. Koreksi Dana Bergulir

Koreksi Dana Bergulir sebesar Rp82.836.000,00 merupakan koreksi tambah atas pelunasan Dana Bergulir pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

h. Koreksi Penyertaan Modal

Koreksi Penyertaan Modal sebesar Rp(7.227.383.830,00) dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.319 Rincian Koreksi Penyertaan Modal

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3
Badan Keuangan dan Aset Daerah	334.043.580,00	Koreksi Tambah : Merupakan penambahan nilai Investasi Permanen Provinsi Kepulauan Riau atas laba (*unaudited*) yang diperolah dari penyertaan modal pada BUMD PT. Pembangunan Kepri sebesar Rp334.043.580,00
	(7.561.427.410,00)	Koreksi Kurang : Merupakan penurunan nilai Investasi Permanen Provinsi Kepulauan Riau atas rugi (*unaudited*) yang diperolah dari penyertaan modal pada BUMD PT. Energi Kepri sebesar Rp(320.664.748,00), rugi (*unaudited*) dan koreksi saldo laba ditahan yang diperolah dari penyertaan modal pada BUMD PT. Pelabuhan Kepri sebesar Rp(1.469.619.241,00), dan rugi (*unaudited*) dan koreksi saldo laba ditahan yang diperolah dari penyertaan modal pada BUMD PDAM Tirta Kepri sebesar Rp(5.771.143.421,00).
Total	**(7.227.383.830,00)**	

i. Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp703.221.350,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.320 Rincian Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3
Dinas Pendidikan	157.621.350,00	Koreksi Tambah : Merupakan penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Peralatan Personal Komputer sebesar Rp12.587.500,00 berdasarkan temuan kurang catat nilai aset oleh Inspektorat pada SMK Negeri 4 Tanjungpinang, dan Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Personal Komputer sebesar Rp114.850.000,00, Aset Tetap Peralatan dan Mesin – Peralatan Personal Komputer sebesar Rp12.100.000,00 dan Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat Kantor Lainnya sebesar Rp23.050.000,00, karena kurang catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari bantuan hibah PT PLN (Persero) tahun 2024 berdasarkan BAST Nomor 1826.BA/ CSR.00.01/F1000000/2024 yanggal 25 April 2024 pada SMK Negeri 2 Lingga. Koreksi Kurang : Merupakan pengurangan atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari bantuan Hibah PT. PLN (Persero) ke Aset Ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap sebesar Rp(4.966.150,00).
Dinas Kelautan dan Perikanan	545.600.000,00	Merupakan penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus sebesar Rp545.600.000,00 karena kurang catat aset yang pengadaannya melalui belanja barang dan jasa tahun 2013.
Total	**703.221.350,00**	

j. Koreksi Aset Tetap Lainnya

Koreksi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.167.094.500,00 merupakan koreksi tambah Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi yang pengadaannya melalui belanja barang dan jasa tahun 2014 berupa renovasi Rumah Kemasan dan Pasar Ikan Moro pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

k. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp(32.359.539.450,73) merupakan koreksi akumulasi penyusutan aset tetap atas penyesuaian saldo awal, koreksi akumulasi penyusutan aset tetap atas mutasi masuk dan mutasi keluar aset tetap antar SKPD, dan koreksi akumulasi penyusutan aset tetap atas pendapatan hibah barang dari pemerintah pusat/daerah/dan instansi lainnya.

l. Koreksi Aset Lainnya

Koreksi Aset Lainnya sebesar Rp(1.380.000,00) merupakan koreksi kurang Aset Lainnya atas temuan kelebihan pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) pada Sekretariat DPRD.

m. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya-Aset Rusak Berat/Lainnya

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya-Aset Rusak Berat/Lainnya sebesar Rp13.779.736.167,30 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.321 Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Rusak Berat/Lainnya

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	596.776.002,00	Merupakan koreksi tambah atas penghapusan Aset Lainnya berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1372/KPTS-27/VIII/2025.
Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.666.891.200,00	Merupakan koreksi tambah atas penghapusan Aset Lainnya berdasarkan SK Penghapusan Nomor 1292 Tahun 2025 tanggal 11 Desember 2025 dan SK Penghapusan Nomor 1027 Tahun 2025 tanggal 23 September 2025.
Sekretariat Daerah	8.052.039.491,00	Merupakan koreksi tambah atas Hibah dan penghapusan Aset Lainnya SK Nomor 1237/KPTS-27/XI/2025 tanggal 28 November 2025.
Dinas Kebudayaan	54.620.000,00	Merupakan koreksi tambah atas penghapusan Aset Lainnya berdasarkan SK Nomor 1725/KPTS-27/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025.
Dinas Komunikasi dan Informatika	392.324.702,00	Merupakan koreksi tambah atas penghapusan Aset Lainnya berdasarkan SK Nomor 1213/KPTS-27/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025 dan SK Nomor 1027 Tahun 2025 tanggal 23 September 2025.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30.849.000,00	Merupakan koreksi tambah atas penghapusan Aset Lainnya berdasarkan SK Nomor 1027 Tahun 2025 tanggal 23 Sepetember 2025.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	377.926.349,81	Merupakan koreksi tambah atas penghapusan Aset Lainnya berdasarkan SK Nomor 880/KPTS-27/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 dan SK Nomor 1311 /KPTS-27/ VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025.
Dinas Pendidikan	215.964.766,98	Merupakan koreksi tambah atas penghapusan Aset Lainnya berdasarkan SK Nomor 1493/KPTS-27/IX/2025 Tanggal 29 September 2025 pada SMK Negeri 1 Tanjungpinang.
Dinas Perhubungan	545.730.515,00	Merupakan koreksi tambah atas penghapusan Aset Lainnya berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 299/03.04/2025-01 tanggal 10 September 2025 dan SK Penghapusan Nomor 1027 Tahun 2025 tanggal 23 Sepetember 2025 dan SK Nomor 1318 Tahun 2025 Tanggal 18 Desember 2025.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	859.658.745,84	Merupakan koreksi tambah atas penjualan dan penghapusan Aset Lainnya berdasarkan SK Nomor 1027 Tahun 2025 tanggal 23 Sepetember 2025.
Dinas Sosial	313.488.000,00	Merupakan koreksi tambah atas penghapusan Aset Lainnya berdasarkan SK Nomor 1027 tahun 2025 tanggal 23 September 2025.
Inspektorat	257.484.794,67	Merupakan koreksi tambah atas penghapusan Aset Lainnya berdasarkan SK

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3
		Nomor 602/KPTS-27/I/2025 tanggal 20 Januari 2025.
Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	344.893.600,00	Merupakan koreksi tambah atas penghapusan Aset Lainnya berdasarkan SK Nomor 1027 tahun 2025, Tanggal 23 Sepetember 2025.
Sekretariat DPRD	71.089.000,00	Merupakan koreksi tambah atas penghapusan Aset Lainnya berdasarkan SK Nomor 1322/KPTS-27/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025.
Total	**13.779.736.167,30**	

n. Koreksi Utang Belanja

Koreksi Utang Belanja sebesar Rp64.666.079,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.322 Rincian Koreksi Utang Belanja

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3
Dinas Pendidikan	34.224.079,00	Merupakan koreksi kurang atas penghapusan Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN berdasarkan Konfirmasi Status Pembayaran Iuran JKK dan JKM PTK Non ASN pada Dinas Pendidikan.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	30.442.000,00	Merupakan koreksi kurang atas penghapusan Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 217/SPTJM/PERKIM/2026.
Total	**64.666.079,00**	

o. Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya

Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp(972.523.458,87) dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.323 Rincian Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya

Nama SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3
Badan Pendapatan Daerah	81.797.436,00	Koreksi Tambah : Merupakan koreksi kurang saldo awal Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp81.797.436,00 karena pelunasan utang/kompensasi pajak tahun 2025.
	(1.054.320.894,87)	Koreksi Kurang : Merupakan koreksi kurang Utang Jangka Pendek Lainnya atas saldo awal Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp(1.054.320.894,87) karena kesalahan perhitungan ganda pelunasan utang tahun sebelumnya.
Total	**(972.523.458,87)**	

p. Koreksi Pendapatan Retribusi-LO

Koreksi Pendapatan Retribusi-LO sebesar Rp125.000.000,00 merupakan koreksi kurang Pendapatan Retribusi-Pemakaian Alat-LO atas kekurangan setoran pendapatan tahun 2024 yang berasal dari penyewaan alat *Atomic Absorption Spectrofotometri* oleh PT. Mutuagung Lestari, Tbk.

q. Koreksi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Koreksi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp69.812.500,00 merupakan koreksi kurang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO-Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD atas pendapatan kantin SMA/SMK/SLB Negeri tahun 2024 yang disetorkan di tahun 2025.

7.5.6.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	6.405.952.705.462,58	**6.454.280.263.239,55**

Ekuitas Akhir sebesar Rp6.405.952.705.462,58 merupakan saldo kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Total Aset dan Total Kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

- Jumlah Aset Tahun 2025	6.815.191.552.141,75
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025	409.238.846.679,17
Saldo Akhir Ekuitas 2025	**6.405.952.705.462,58**

7.6. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

7.6.1. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Terpilih Periode 2025-2030

Pada tanggal 20 Februari 2025 Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Terpilih Periode 2025-2030 resmi dilantik berdasarkan Keputusan Presiden nomor 15/P Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025 - 2030. Bertempat di Istana Negara Jakarta, Pengambilan sumpah jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau terpilih yaitu pasangan Ansar Ahmad, SE., MM dan Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersamaan dengan pelantikan kepala daerah terpilih lainnya di seluruh Indonesia.

Mandat yang diberikan oleh masyarakat Kepulauan Riau bukan sekadar kemenangan elektoral, melainkan 'Warkah Amanah' untuk membawa Bumi Segantang Lada melompat lebih tinggi. Dengan Visi “Mewujudkan Kepulauan Riau yang Maju, Makmur, dan Merata”, Kepemimpinan periode 2025-2030 hadir dengan satu tekad bulat: menuntaskan pembangunan yang inklusif dan transformatif dari ujung Natuna hingga ke jantung Batam." Mengingat Kepulauan Riau terdiri dari 96% lautan dan ribuan pulau, Kita tidak lagi melihat lautan sebagai pemisah, melainkan sebagai 'jembatan' yang menyatukan. Di bawah kepemimpinan periode 2025-2030, paradigma pembangunan yang dilakukan adalah Sentris Kepulauan, di mana setiap pulau adalah titik pertumbuhan, dan setiap selat adalah jalur kemakmuran."tentunya Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau harus memiliki resonansi yang kuat tentang konektivitas dan ekonomi biru.

7.6.2. Ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang berisi visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah. Dokumen RPJMD juga disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan mengacu pada RPJPD, RTRW, RPJMN dan dokumen lainnya. Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu Bapak H. Ansar Ahmad, S.E., M.M dan Bapak Nyanyang Harris Pratamura, S.E., M.Si yang secara resmi dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Dengan Visi “Mewujudkan Kepulauan Riau yang Maju, Makmur, dan Merata” Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 bahwa adanya kesamaan periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 20 tahun kedepan yaitu Tahun 2025-2029, Tahun 2030-2034, Tahun 2035-2039, dan Tahun 2040-2045. Oleh karena itu, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari periode

pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045, yang selaras dengan periode RPJMN Tahun 2025-2029.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah.
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah.
3. Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter.
4. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan.
5. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Selain itu, penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 di dalam perumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau mendukung pada pencapaian target pembangunan nasional. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 tentunya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat perangkat daerah, dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan daerah. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 juga akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD kabupaten/kota, sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan acuan bagi masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

7.7. PENUTUP

Proses Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimulai dengan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tentunya harus dilaksanakan secara tertib dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan rujukan utama Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Melalui proses penyusunan dan penyajian konsolidasi dari laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi, proses penyesuaian dan harmonisasi dilakukan dengan merujuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar terwujud Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memadai sesuai ketentuan.

Akhir kata, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban kami dalam melaporkan dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

Gubernur Kepulauan Riau,

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Ansar Ahmad

LAMPIRAN 1A

REKAPITULASI REALISASI DANA BAGI HASIL (DBH)

No	Tanggal	Jenis Dana	Uraian	Periode	Nilai Kotor	Potongan	Nilai Bersih	Tunda	Status	LKT
1	24 Desember 2025	DBH001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611111 Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	DESEMBER	19.597.692.900,00	0,00	19.597.692.900,00	0,00	SP2D	Diterima: 24-12-2025
2	24 Desember 2025	DBH001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611112 Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	DESEMBER	1.008.744.400,00	0,00	1.008.744.400,00	0,00	SP2D	Diterima: 24-12-2025
3	24 Desember 2025	DBH001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611211 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	DESEMBER	325.477.800,00	0,00	325.477.800,00	0,00	SP2D	Diterima: 24-12-2025
4	24 Desember 2025	DBH001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611211 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	DESEMBER	55.709.100,00	0,00	55.709.100,00	0,00	SP2D	Diterima: 24-12-2025
5	24 Desember 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611211 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	DESEMBER	2.726.224.800,00	0,00	2.726.224.800,00	0,00	SP2D	Diterima: 24-12-2025
6	24 Desember 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611211 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	DESEMBER	37.352.800,00	0,00	37.352.800,00	0,00	SP2D	Diterima: 24-12-2025
7	24 Desember 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	613111 Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	DESEMBER	20.318.600,00	0,00	20.318.600,00	0,00	SP2D	Diterima: 24-12-2025
8	19 Desember 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	613111 Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	AGUSTUS	20.318.600,00	0,00	20.318.600,00	0,00	SP2D	Diterima: 19-12-2025
9	19 Desember 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	613111 Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	OKTOBER	20.318.600,00	0,00	20.318.600,00	0,00	SP2D	Diterima: 19-12-2025
10	28 November 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612512 Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	NOVEMBER	6.948.000,00	0,00	6.948.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 28-11-2025
11	28 November 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612513 Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	NOVEMBER	106.921.400,00	0,00	106.921.400,00	0,00	SP2D	Diterima: 28-11-2025
12	26 November 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612111 Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	NOVEMBER	463.833.000,00	0,00	463.833.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 26-11-2025
13	26 November 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612211 Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi	NOVEMBER	9.422.529.200,00	0,00	9.422.529.200,00	0,00	SP2D	Diterima: 26-11-2025
14	26 November 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612311 Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	NOVEMBER	269.101.200,00	0,00	269.101.200,00	0,00	SP2D	Diterima: 26-11-2025
15	26 November 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612312 Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	NOVEMBER	1.056.608.600,00	0,00	1.056.608.600,00	0,00	SP2D	Diterima: 26-11-2025
16	18 November 2025	DBH 004 Alokasi DBH Lainnya yang disalurkan	612711 Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	TAHAP 2	578.217.000,00	0,00	578.217.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 18-11-2025
17	31 Oktober 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611111 Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	OKTOBER	39.195.385.800,00	0,00	39.195.385.800,00	0,00	SP2D	Diterima: 31-10-2025
18	31 Oktober 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611112 Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	OKTOBER	2.017.488.800,00	0,00	2.017.488.800,00	0,00	SP2D	Diterima: 31-10-2025
19	31 Oktober 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611211 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	OKTOBER	5.452.449.600,00	0,00	5.452.449.600,00	0,00	SP2D	Diterima: 31-10-2025
20	31 Oktober 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611211 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	OKTOBER	111.418.200,00	0,00	111.418.200,00	0,00	SP2D	Diterima: 31-10-2025
21	31 Oktober 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611211 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	OKTOBER	650.955.600,00	0,00	650.955.600,00	0,00	SP2D	Diterima: 31-10-2025
22	31 Oktober 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611211 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	OKTOBER	74.705.600,00	0,00	74.705.600,00	0,00	SP2D	Diterima: 31-10-2025
23	30 September 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612111 Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	SEPTEMBER	463.833.000,00	0,00	463.833.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 30-09-2025
24	30 September 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612211 Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi	SEPTEMBER	9.422.529.200,00	0,00	9.422.529.200,00	0,00	SP2D	Diterima: 30-09-2025
25	30 September 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612311 Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	SEPTEMBER	269.101.200,00	0,00	269.101.200,00	0,00	SP2D	Diterima: 30-09-2025
26	30 September 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612312 Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	SEPTEMBER	1.056.608.600,00	0,00	1.056.608.600,00	0,00	SP2D	Diterima: 30-09-2025
27	30 September 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612512 Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	SEPTEMBER	6.948.000,00	0,00	6.948.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 30-09-2025
28	30 September 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612513 Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	SEPTEMBER	106.921.400,00	0,00	106.921.400,00	0,00	SP2D	Diterima: 30-09-2025
29	29 Agustus 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611111 Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	FEBRUARI	19.597.692.900,00	0,00	19.597.692.900,00	0,00	SP2D	Diterima: 29-09-2025
30	29 Agustus 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611111 Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	APRIL	29.396.539.350,00	0,00	29.396.539.350,00	0,00	SP2D	Diterima: 29-09-2025
31	29 Agustus 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611111 Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	JUNI	29.396.539.350,00	0,00	29.396.539.350,00	0,00	SP2D	Diterima: 29-09-2025
32	29 Agustus 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611111 Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	AGUSTUS	39.195.385.800,00	0,00	39.195.385.800,00	0,00	SP2D	Diterima: 29-09-2025
33	29 Agustus 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611112 Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	FEBRUARI	1.008.744.400,00	0,00	1.008.744.400,00	0,00	SP2D	Diterima: 29-09-2025

No	Tanggal	Jenis Dana	Uraian	Periode	Nilai Kotor	Potongan	Nilai Bersih	Tunda	Status	LKT
34	29 Agustus 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611112 Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	APRIL	1.513.116.600,00	0,00	1.513.116.600,00	0,00	SP2D	Diterima: 29-09-2025
35	29 Agustus 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611112 Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	JUNI	1.513.116.600,00	0,00	1.513.116.600,00	0,00	SP2D	Diterima: 29-09-2025
36	29 Agustus 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611112 Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	AGUSTUS	2.017.488.800,00	0,00	2.017.488.800,00	0,00	SP2D	Diterima: 29-09-2025
37	29 Agustus 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611211 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	FEBRUARI	325.477.800,00	0,00	325.477.800,00	0,00	SP2D	Diterima: 29-09-2025
38	29 Agustus 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611211 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	FEBRUARI	2.726.224.800,00	0,00	2.726.224.800,00	0,00	SP2D	Diterima: 29-09-2025
39	29 Agustus 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611211 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	FEBRUARI	55.709.100,00	0,00	55.709.100,00	0,00	SP2D	Diterima: 29-09-2025
40	29 Agustus 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611211 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	FEBRUARI	37.352.800,00	0,00	37.352.800,00	0,00	SP2D	Diterima: 29-09-2025
41	29 Agustus 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611211 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	APRIL	83.563.650,00	0,00	83.563.650,00	0,00	SP2D	Diterima: 29-09-2025
42	29 Agustus 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611211 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	APRIL	488.216.700,00	0,00	488.216.700,00	0,00	SP2D	Diterima: 29-09-2025
43	29 Agustus 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611211 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	APRIL	56.029.200,00	0,00	56.029.200,00	0,00	SP2D	Diterima: 29-09-2025
44	29 Agustus 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611211 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	APRIL	4.089.337.200,00	0,00	4.089.337.200,00	0,00	SP2D	Diterima: 29-09-2025
45	29 Agustus 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611211 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	JUNI	83.563.650,00	0,00	83.563.650,00	0,00	SP2D	Diterima: 29-09-2025
46	29 Agustus 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611211 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	JUNI	56.029.200,00	0,00	56.029.200,00	0,00	SP2D	Diterima: 29-09-2025
47	29 Agustus 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611211 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	JUNI	488.216.700,00	0,00	488.216.700,00	0,00	SP2D	Diterima: 29-09-2025
48	29 Agustus 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611211 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	JUNI	4.089.337.200,00	0,00	4.089.337.200,00	0,00	SP2D	Diterima: 29-09-2025
49	29 Agustus 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611211 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	AGUSTUS	650.955.600,00	0,00	650.955.600,00	0,00	SP2D	Diterima: 29-09-2025
50	29 Agustus 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611211 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	AGUSTUS	111.418.200,00	0,00	111.418.200,00	0,00	SP2D	Diterima: 29-09-2025
51	29 Agustus 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611211 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	AGUSTUS	5.452.449.600,00	0,00	5.452.449.600,00	0,00	SP2D	Diterima: 29-09-2025
52	29 Agustus 2025	DBH 001 Alokasi DBH Pajak yang disalurkan	611211 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	AGUSTUS	74.705.600,00	0,00	74.705.600,00	0,00	SP2D	Diterima: 29-09-2025
53	19 Agustus 2025	DBH 003 Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan	611111 Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	KB	11.457.881.000,00	0,00	11.457.881.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 19-08-2025
54	19 Agustus 2025	DBH 003 Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan	611112 Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	KB	787.307.000,00	0,00	787.307.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 19-08-2025
55	19 Agustus 2025	DBH 003 Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan	611211 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	KB	69.595.000,00	0,00	69.595.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 19-08-2025
56	19 Agustus 2025	DBH 003 Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan	611211 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	KB	7.123.764.000,00	0,00	7.123.764.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 19-08-2025
57	19 Agustus 2025	DBH 003 Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan	611211 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	KB	126.352.000,00	0,00	126.352.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 19-08-2025
58	19 Agustus 2025	DBH 003 Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan	611211 Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	KB	31.319.000,00	0,00	31.319.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 19-08-2025
59	19 Agustus 2025	DBH 003 Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan	613111 Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	KB	1.558.000,00	0,00	1.558.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 19-08-2025
60	13 Agustus 2025	DBH 003 Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan	612111 Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	KB	1.940.423.000,00	0,00	1.940.423.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 13-08-2025
61	13 Agustus 2025	DBH 003 Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan	612311 Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	KB	4.465.000,00	0,00	4.465.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 13-08-2025
62	13 Agustus 2025	DBH 003 Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan	612511 Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	KB	616.000,00	0,00	616.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 13-08-2025
63	13 Agustus 2025	DBH 003 Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan	612512 Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	KB	80.590.000,00	0,00	80.590.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 13-08-2025
64	13 Agustus 2025	DBH 003 Alokasi Kurang Bayar DBH yang disalurkan	612513 Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	KB	1.337.422.000,00	0,00	1.337.422.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 13-08-2025
65	31 Juli 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612111 Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	JULI	463.833.000,00	0,00	463.833.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 31-07-2025
66	31 Juli 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612211 Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi	JULI	9.422.529.200,00	0,00	9.422.529.200,00	0,00	SP2D	Diterima: 31-07-2025

No	Tanggal	Jenis Dana	Uraian	Periode	Nilai Kotor	Potongan	Nilai Bersih	Tunda	Status	LKT
67	31 Juli 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612311 Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	JULI	269.101.200,00	0,00	269.101.200,00	0,00	SP2D	Diterima: 31-07-2025
68	31 Juli 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612312 Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	JULI	1.056.608.600,00	0,00	1.056.608.600,00	0,00	SP2D	Diterima: 31-07-2025
69	31 Juli 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612512 Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	JULI	6.948.000,00	0,00	6.948.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 31-07-2025
70	31 Juli 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612513 Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	JULI	106.921.400,00	0,00	106.921.400,00	0,00	SP2D	Diterima: 31-07-2025
71	28 Mei 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612111 Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	MEI	347.874.750,00	0,00	347.874.750,00	0,00	SP2D	Diterima: 28-05-2025
72	28 Mei 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612211 Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi	MEI	7.066.896.900,00	0,00	7.066.896.900,00	0,00	SP2D	Diterima: 28-05-2025
73	28 Mei 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612311 Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	MEI	201.825.900,00	0,00	201.825.900,00	0,00	SP2D	Diterima: 28-05-2025
74	28 Mei 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612312 Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	MEI	792.456.450,00	0,00	792.456.450,00	0,00	SP2D	Diterima: 28-05-2025
75	28 Mei 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612512 Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	MEI	5.211.000,00	0,00	5.211.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 28-05-2025
76	28 Mei 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612513 Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	MEI	80.191.050,00	0,00	80.191.050,00	0,00	SP2D	Diterima: 28-05-2025
77	27 Mei 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612513 Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	MARET	80.191.050,00	0,00	80.191.050,00	0,00	SP2D	Diterima: 27-05-2025
78	27 Mei 2025	DBH 004 Alokasi DBH Lainnya yang disalurkan	612711 Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	TAHAP 1	578.217.000,00	0,00	578.217.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 27-05-2025
79	11 April 2025	TDF/PR 000 Non Anggaran	827251 Pengeluaran Non Anggaran Pokok TDF-DBH	TDF TA 2024-THR	3.138.890.000,00	0,00	3.138.890.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 11-04-2025
80	24 Maret 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612111 Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	MARET	347.874.750,00	0,00	347.874.750,00	0,00	SP2D	Diterima: 24-03-2025
81	24 Maret 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612211 Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi	MARET	7.066.896.900,00	0,00	7.066.896.900,00	0,00	SP2D	Diterima: 24-03-2025
82	24 Maret 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612311 Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	MARET	201.825.900,00	0,00	201.825.900,00	0,00	SP2D	Diterima: 24-03-2025
83	24 Maret 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612312 Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	MARET	792.456.450,00	0,00	792.456.450,00	0,00	SP2D	Diterima: 24-03-2025
84	24 Maret 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612512 Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	MARET	5.211.000,00	0,00	5.211.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 24-03-2025
85	30 Januari 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612111 Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	JANUARI	231.916.500,00	0,00	231.916.500,00	0,00	SP2D	Diterima: 30-01-2025
86	30 Januari 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612211 Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi	JANUARI	4.711.264.600,00	0,00	4.711.264.600,00	0,00	SP2D	Diterima: 30-01-2025
87	30 Januari 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612311 Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	JANUARI	134.550.600,00	0,00	134.550.600,00	0,00	SP2D	Diterima: 30-01-2025
88	30 Januari 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612312 Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	JANUARI	528.304.300,00	0,00	528.304.300,00	0,00	SP2D	Diterima: 30-01-2025
89	30 Januari 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612512 Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	JANUARI	3.474.000,00	0,00	3.474.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 30-01-2025
90	30 Januari 2025	DBH 002 Alokasi DBH SDA yang disalurkan	612513 Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	JANUARI	53.460.700,00	0,00	53.460.700,00	0,00	SP2D	Diterima: 30-01-2025
		JUMLAH			**297.708.095.000,00**	**0,00**	**297.708.095.000,00**	**0,00**		

LAMPIRAN 1B

REKAPITULASI REALISASI DANA ALOKASI UMUM (DAU)

No	Tanggal	Jenis Dana	Uraian	Periode	Nilai Kotor	Potongan	Nilai Bersih	Tunda	Status	LKT
1	30 Desember 2025	DAU007 Alokasi DAU Dukungan Penggajian PPPK Daerah yang disalurkan	621121 Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	DESEMBER	4.009.153.524,00	0,00	4.009.153.524,00	0,00	SP2D	Diterima: 30-12-2025
2	29 Desember 2025	DAU004 Alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan	621111 Belanja Dana Alokasi Umum	DESEMBER	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 29-12-2025
3	12 Desember 2025	DAU007 Alokasi DAU Dukungan Penggajian PPPK Daerah yang disalurkan	621121 Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	NOVEMBER	14.933.469.923,00	0,00	14.933.469.923,00	0,00	SP2D	Diterima: 12-12-2025
4	04 Desember 2025	DAU010 Alokasi DAU Dukungan Bidang Kesehatan yang disalurkan	621124 Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	TAHAP 3	3.483.864.000,00	0,00	3.483.864.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 04-12-2025
5	28 November 2025	DAU004 Alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan	621111 Belanja Dana Alokasi Umum	DESEMBER	85.668.521.000,00	0,00	85.668.521.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 28-11-2025
6	17 November 2025	DAU007 Alokasi DAU Dukungan Penggajian PPPK Daerah yang disalurkan	621121 Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	OKTOBER	14.933.057.153,00	0,00	14.933.057.153,00	0,00	SP2D	Diterima: 17-11-2025
7	31 Oktober 2025	DAU 004 Alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan	621111 Belanja Dana Alokasi Umum	NOVEMBER	85.668.521.000,00	0,00	85.668.521.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 31-10-2025
8	23 Oktober 2025	DAU009 Alokasi DAU Dukungan Bidang Pendidikan yang disalurkan	621123 Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	TAHAP 3	18.523.685.000,00	0,00	18.523.685.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 23-10-2025
9	30 September 2025	DAU004 Alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan	621111 Belanja Dana Alokasi Umum	OKTOBER	85.668.521.000,00	220.939.934,00	85.447.581.066,00	0,00	SP2D	Diterima: 30-09-2025
10	08 September 2025	DAU007 Alokasi DAU Dukungan Penggajian PPPK Daerah yang disalurkan	621121 Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	SEPTEMBER	12.408.685.528,00	0,00	12.408.685.528,00	0,00	SP2D	Diterima: 08-09-2025
11	29 Agustus 2025	DAU 004 Alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan	621111 Belanja Dana Alokasi Umum	SEPTEMBER	85.668.521.000,00	0,00	85.668.521.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 29-09-2025
12	28 Agustus 2025	DAU 009 Alokasi DAU Dukungan Bidang Pendidikan yang disalurkan	621123 Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	TAHAP 2	33.342.633.000,00	0,00	33.342.633.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 28-08-2025
13	28 Agustus 2025	DAU010 Alokasi DAU Dukungan Bidang Kesehatan yang disalurkan	621124 Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	TAHAP 2	6.270.952.000,00	0,00	6.270.952.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 28-08-2025
14	11 Agustus 2025	DAU 007 Alokasi DAU Dukungan Penggajian PPPK Daerah yang disalurkan	621121 Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	AGUSTUS	12.399.343.819,00	0,00	12.399.343.819,00	0,00	SP2D	Diterima: 11-08-2025
15	31 Juli 2025	DAU 004 Alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan	621111 Belanja Dana Alokasi Umum	AGUSTUS	85.668.521.000,00	0,00	85.668.521.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 31-07-2025
16	11 Juli 2025	DAU 007 Alokasi DAU Dukungan Penggajian PPPK Daerah yang disalurkan	621121 Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	JULI	12.428.090.817,00	0,00	12.428.090.817,00	0,00	SP2D	Diterima: 11-07-2025
17	07 Juli 2025	DAU 007 Alokasi DAU Dukungan Penggajian PPPK Daerah yang disalurkan	621121 Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	JUNI	12.428.090.817,00	0,00	12.428.090.817,00	0,00	SP2D	Diterima: 07-07-2025
18	01 Juli 2025	DAU 010 Alokasi DAU Dukungan Bidang Kesehatan yang disalurkan	621124 Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	TAHAP 1	4.180.635.000,00	0,00	4.180.635.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 01-07-2025
19	30 Juni 2025	DAU 004 Alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan	621111 Belanja Dana Alokasi Umum	JULI	85.668.521.000,00	0,00	85.668.521.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 30-06-2025
20	25 Juni 2025	DAU 009 Alokasi DAU Dukungan Bidang Pendidikan yang disalurkan	621123 Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	TAHAP 1	22.228.422.000,00	0,00	22.228.422.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 25-06-2025
21	28 Mei 2025	DAU 004 Alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan	621111 Belanja Dana Alokasi Umum	JUNI	85.668.521.000,00	0,00	85.668.521.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 28-05-2025
22	30 April 2025	DAU 004 Alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan	621111 Belanja Dana Alokasi Umum	MEI	85.668.521.000,00	0,00	85.668.521.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 30-04-2025
23	27 Maret 2025	DAU 004 Alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan	621111 Belanja Dana Alokasi Umum	APRIL	85.668.521.000,00	0,00	85.668.521.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 27-03-2025
24	28 Februari 2025	DAU 004 Alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan	621111 Belanja Dana Alokasi Umum	MARET	85.668.521.000,00	0,00	85.668.521.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 28-02-2025
25	31 Januari 2025	DAU 004 Alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan	621111 Belanja Dana Alokasi Umum	FEBRUARI	85.668.521.000,00	0,00	85.668.521.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 31-01-2025
26	02 Januari 2025	DAU 004 Alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan	621111 Belanja Dana Alokasi Umum	JANUARI	85.668.521.000,00	0,00	85.668.521.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 02-01-2025
		JUMLAH			**1.199.592.340.581,00**	**220.939.934,00**	**1.199.371.400.647,00**	**0,00**		

LAMPIRAN 1C

REKAPITULASI REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

No	Tanggal	Jenis Dana	Uraian	Periode	Nilai Kotor	Potongan	Nilai Bersih	Tunda	Status	LKT
1	29 Desember 2025	DAK NF 004 Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah yang disalurkan	654211 Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	KURANG SALUR	337.500.000,00	16.825.000,00	320.675.000,00	-	SP2D	Diterima: 29-12-2025
2	24 Desember 2025	DAK F 005 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Subbidang SMK yang disalurkan	631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan	Tahap 3	2.933.984.489,00	0,00	2.933.984.489,00	0,00	SP2D	Diterima: 24-12-2025
3	24 Desember 2025	DAK F 004 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan yang disalurkan	631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan	Tahap 3	14.180.912.692,00	0,00	14.180.912.692,00	0,00	SP2D	Diterima: 24-12-2025
4	24 Desember 2025	DAK F 001 Penugasan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang disalurkan	631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan	TAHAP 3	715.428.989,00	0,00	715.428.989,00	0,00	SP2D	Diterima: 24-12-2025
5	23 Desember 2025	DAK F 004 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan yang disalurkan	631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan	Tahap 4	1.612.300.000,00	0,00	1.612.300.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 23-12-2025
6	23 Desember 2025	DAK NF 003 Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan	654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	TRIWULAN III	28.832.400,00	1.537.728,00	27.294.672,00	0,00	SP2D	Diterima: 23-12-2025
7	23 Desember 2025	DAK NF 003 Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan	654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	TRIWULAN IV	443.563.500,00	30.785.349,00	412.778.151,00	0,00	SP2D	Diterima: 23-12-2025
8	23 Desember 2025	DAK NF 003 Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan	654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	KURANG SALUR	10.021.415.200,00	727.874.877,00	9.293.540.323,00	0,00	SP2D	Diterima: 23-12-2025
9	23 Desember 2025	DAK NF 004 Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah yang disalurkan	654211 Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	TRIWULAN III	1.500.000,00	90.000,00	1.410.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 24-12-2025
10	23 Desember 2025	DAK NF 004 Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah yang disalurkan	654211 Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	TRIWULAN IV	1.500.000,00	90.000,00	1.410.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 23-12-2025
11	23 Desember 2025	DAK NF 005 Alokasi Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah yang disalurkan	654112 Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	TRIWULAN IV	327.048.600,00	20.410.413,00	306.638.187,00	0,00	SP2D	Diterima: 23-12-2025
12	12 Desember 2025	DAK NF 003 Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan	654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	TRIWULAN III	445.075.500,00	30.657.661,00	414.417.839,00	0,00	SP2D	Diterima: 12-12-2025
13	04 Desember 2025	DAK NF 003 Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan	654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	TRIWULAN IV	2.565.091.500,00	217.588.115,00	2.347.503.385,00	0,00	SP2D	Diterima: 04-12-2025
14	04 Desember 2025	DAK NF 004 Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah yang disalurkan	654211 Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	TRIWULAN III	294.000.000,00	17.565.000,00	276.435.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 04-12-2025
15	04 Desember 2025	DAK NF 004 Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah yang disalurkan	654211 Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	TRIWULAN IV	294.000.000,00	17.565.000,00	276.435.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 04-12-2025
16	02 Desember 2025	DAK NF 006 Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas yang disalurkan	654711 Dana Bantuan Operasional Kesehatan	TAHAP 2	1.932.022.990,00	0,00	1.932.022.990,00	0,00	SP2D	Diterima: 02-12-2025
17	24 November 2025	DAK NF 003 Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan	654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	TRIWULAN III	2.632.036.700,00	219.563.580,00	2.412.473.120,00	0,00	SP2D	Diterima: 24-11-2025
18	24 November 2025	DAK NF 003 Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan	654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	TRIWULAN IV	20.814.575.100,00	1.497.291.896,00	19.317.283.204,00	0,00	SP2D	Diterima: 24-11-2025
19	24 November 2025	DAK NF 004 Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah yang disalurkan	654211 Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	KURANG SALUR	195.250.000,00	9.737.500,00	185.512.500,00	0,00	SP2D	Diterima: 24-11-2025
20	20 November 2025	DAK NF 007 Alokasi Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang disalurkan	654712 Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	TAHAP 2	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 20-11-2025
21	19 November 2025	DAK NF 004 Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah yang disalurkan	654211 Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	TRIWULAN II	1.500.000,00	90.000,00	1.410.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 19-11-2025
22	14 November 2025	DAK NF 004 Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah yang disalurkan	654211 Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	TRIWULAN I	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 14-11-2025
23	14 November 2025	DAK NF 005 Alokasi Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah yang disalurkan	654112 Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	TRIWULAN III	327.048.600,00	19.971.131,00	307.077.469,00	0,00	SP2D	Diterima: 14-11-2025
24	13 November 2025	DAK NF 039 Alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian yang disalurkan	655411 Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	TAHAP 2	13.680.000,00	0,00	13.680.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 13-11-2025
25	12 November 2025	BOSP 001 Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang disalurkan	654311 Dana Bantuan Operasional Sekolah	Tahap 2	110.374.800,00	0,00	110.374.800,00	0,00	SP2D	Diterima: 12-11-2025
26	10 November 2025	DAK NF 008 Alokasi Dana Pengingkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang disalurkan	654812 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	TAHAP 2	6.689.962.500,00	0,00	6.689.962.500,00	0,00	SP2D	Diterima: 10-11-2025

No	Tanggal	Jenis Dana	Uraian	Periode	Nilai Kotor	Potongan	Nilai Bersih	Tunda	Status	LKT
27	05 November 2025	DAK NF 022 Alokasi Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah yang disalurkan	655511 Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	TAHAP 2	2.320.000.000,00	0,00	2.320.000.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 05-11-2025
28	03 November 2025	DAK NF 003 Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan	654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	TRIWULAN III	6.970.368.900,00	544.007.340,00	6.426.361.560,00	0,00	SP2D	Diterima: 03-11-2025
29	29 Oktober 2025	BOSP 001 Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang disalurkan	654311 Dana Bantuan Operasional Sekolah	Tahap 2	1.348.250.404,00	0,00	1.348.250.404,00	0,00	SP2D	Diterima: 29-10-2025
30	27 Oktober 2025	DAK NF 003 Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan	654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	TRIWULAN III	14.209.420.600,00	993.495.193,00	13.215.925.407,00	0,00	SP2D	Diterima: 27-10-2025
31	23 Oktober 2025	DAK F 004 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan yang disalurkan	631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan	Tahap 2	24.084.454.230,00	0,00	24.084.454.230,00	0,00	SP2D	Diterima: 23-10-2025
32	22 Oktober 2025	DAK F 005 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Subbidang SMK yang disalurkan	631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan	Tahap 2	4.725.000.000,00	0,00	4.725.000.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 22-10-2025
33	17 Oktober 2025	DAK F 004 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan yang disalurkan	631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan	Tahap 4	3.225.000.000,00	0,00	3.225.000.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 17-10-2025
34	17 Oktober 2025	DAK F 001 Penugasan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang disalurkan	631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan	TAHAP 2	1.936.461.344,00	0,00	1.936.461.344,00	0,00	SP2D	Diterima: 17-10-2025
35	17 Oktober 2025	DAK NF 005 Alokasi Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah yang disalurkan	654112 Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	KURANG SALUR	83.637.100,00	4.630.165,00	79.006.935,00	0,00	SP2D	Diterima: 17-10-2025
36	13 Oktober 2025	DAK NF 019 Alokasi Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang disalurkan	655211 Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	TAHAP 2	225.371.000,00	0,00	225.371.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 13-10-2025
37	10 Oktober 2025	DAK F 004 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan yang disalurkan	631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan	Tahap 4	18.052.331.000,00	0,00	18.052.331.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 10-10-2025
38	07 Oktober 2025	DAK NF 004 Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah yang disalurkan	654211 Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	TRIWULAN II	171.750.000,00	10.267.500,00	161.482.500,00	0,00	SP2D	Diterima: 07-10-2025
39	03 Oktober 2025	DAK NF 036 Alokasi Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Dearah yang disalurkan	655611 Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah	TAHAP 2	499.500.000,00	0,00	499.500.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 03-10-2025
40	01 Oktober 2025	DAK NF 003 Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan	654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	TRIWULAN III	10.224.870.300,00	700.591.473,00	9.524.278.827,00	0,00	SP2D	Diterima: 01-10-2025
41	01 Oktober 2025	DAK NF 004 Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah yang disalurkan	654211 Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	TRIWULAN I	171.750.000,00	8.550.000,00	163.200.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 01-10-2025
42	30 September 2025	DAK NF 005 Alokasi Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah yang disalurkan	654112 Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	TRIWULAN I	37.724.400,00	1.886.220,00	35.838.180,00	0,00	SP2D	Diterima: 30-09-2025
43	30 September 2025	DAK NF 005 Alokasi Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah yang disalurkan	654112 Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	TRIWULAN II	37.724.400,00	2.257.347,00	35.467.053,00	0,00	SP2D	Diterima: 30-09-2025
44	29 September 2025	BOSP 001 Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang disalurkan	654311 Dana Bantuan Operasional Sekolah	Tahap 2	3.610.156.655,00	0,00	3.610.156.655,00	0,00	SP2D	Diterima: 29-09-2025
45	17 September 2025	BOSP 001 Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang disalurkan	654311 Dana Bantuan Operasional Sekolah	Tahap 2	22.220.541.138,00	0,00	22.220.541.138,00	0,00	SP2D	Diterima: 17-09-2025
46	12 September 2025	DAK NF 003 Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan	654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	TRIWULAN II	546.794.400,00	34.209.504,00	512.584.896,00	0,00	SP2D	Diterima: 12-09-2025
47	04 September 2025	DAK NF 003 Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan	654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	TRIWULAN I	563.168.900,00	31.197.735,00	531.971.165,00	0,00	SP2D	Diterima: 04-09-2025
48	28 Agustus 2025	DAK F 004 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Subbidang SMA yang disalurkan	631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan	Sekaligus	441.556.000,00	0,00	441.556.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 28-08-2025
49	28 Agustus 2025	DAK F 005 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Subbidang SMK yang disalurkan	631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan	Tahap 1	2.625.000.000,00	0,00	2.625.000.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 28-08-2025
50	27 Agustus 2025	BOSP 001 Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang disalurkan	654311 Dana Bantuan Operasional Sekolah	Tahap 2	38.042.565.000,00	0,00	38.042.565.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 27-08-2025
51	11 Agustus 2025	BOSP 001 Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang disalurkan	654311 Dana Bantuan Operasional Sekolah	Tahap 2	32.727.859.000,00	0,00	32.727.859.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 11-08-2025
52	30 Juli 2025	DAK NF 005 Alokasi Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah yang disalurkan	654112 Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	TRIWULAN II	265.162.200,00	16.514.053,00	248.648.147,00	0,00	SP2D	Diterima: 30-07-2025

No	Tanggal	Jenis Dana	Uraian	Periode	Nilai Kotor	Potongan	Nilai Bersih	Tunda	Status	LKT
53	28 Juli 2025	DAK NF 004 Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah yang disalurkan	654211 Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	TRIWULAN I	189.000.000,00	9.412.500,00	179.587.500,00	0,00	SP2D	Diterima: 28-07-2025
54	28 Juli 2025	DAK NF 004 Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah yang disalurkan	654211 Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	TRIWULAN II	189.000.000,00	11.302.500,00	177.697.500,00	0,00	SP2D	Diterima: 28-07-2025
55	25 Juli 2025	DAK F 001 Penugasan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang disalurkan	631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan	Tahap 1	1.075.811.857,00	0,00	1.075.811.857,00	0,00	SP2D	Diterima: 25-07-2025
56	03 Juli 2025	DAK F 004 Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan yang disalurkan	631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan	Tahap 1	13.380.252.350,00	0,00	13.380.252.350,00	0,00	SP2D	Diterima: 03-07-2025
57	30 Juni 2025	DAK NF 003 Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan	654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	TRIWULAN II	33.170.851.800,00	2.441.779.386,00	30.729.072.414,00	0,00	SP2D	Diterima: 30-06-2025
58	13 Juni 2025	DAK NF 003 Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan	654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	TRIWULAN I	13.492.893.300,00	796.456.245,00	12.696.437.055,00	0,00	SP2D	Diterima: 13-06-2025
59	13 Juni 2025	DAK NF 005 Alokasi Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah yang disalurkan	654112 Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	TRIWULAN I	76.793.700,00	3.839.685,00	72.954.015,00	0,00	SP2D	Diterima: 13-06-2025
60	13 Juni 2025	DAK NF 039 Alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian yang disalurkan	655411 Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	TAHAP 1	13.680.000,00	0,00	13.680.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 13-06-2025
61	04 Juni 2025	BOSP 015 Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang disalurkan	654311 Dana Bantuan Operasional Sekolah	Tahap 1	4.825.750.000,00	0,00	4.825.750.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 04-06-2025
62	15 Mei 2025	DAK NF 019 Alokasi Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang disalurkan	655211 Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	TAHAP 1	225.371.000,00	4.787.370,00	220.583.630,00	0,00	SP2D	Diterima: 15-05-2025
63	07 Mei 2025	DAK NF 003 Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan	654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	TRIWULAN I	435.263.100,00	31.855.365,00	403.407.735,00	0,00	SP2D	Diterima: 07-05-2025
64	07 Mei 2025	DAK NF 005 Alokasi Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah yang disalurkan	654112 Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	TRIWULAN I	188.368.500,00	10.820.265,00	177.548.235,00	0,00	SP2D	Diterima: 07-05-2025
65	15 April 2025	DAK NF 003 Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan	654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	TRIWULAN I	5.065.353.600,00	346.043.760,00	4.719.309.840,00	0,00	SP2D	Diterima: 15-04-2025
66	27 Maret 2025	DAK NF 003 Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan	654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	TRIWULAN I	224.844.000,00	21.734.130,00	203.109.870,00	0,00	SP2D	Diterima: 27-03-2025
67	25 Maret 2025	DAK NF 003 Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan	654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	TRIWULAN I	3.095.663.800,00	239.863.905,00	2.855.799.895,00	0,00	SP2D	Diterima: 25-03-2025
68	21 Maret 2025	DAK NF 008 Alokasi Dana Pengingkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang disalurkan	654812 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	TAHAP 1	6.689.962.500,00	179.402.505,00	6.510.559.995,00	0,00	SP2D	Diterima: 21-03-2025
69	19 Maret 2025	BOSP 001 Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang disalurkan	654311 Dana Bantuan Operasional Sekolah	Tahap 1	30.690.000,00	0,00	30.690.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 19-03-2025
70	14 Maret 2025	DAK NF 003 Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan	654111 Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	TRIWULAN I	11.006.778.600,00	720.106.740,00	10.286.671.860,00	0,00	SP2D	Diterima: 14-03-2025
71	26 Februari 2025	DAK NF 036 Alokasi Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Dearah yang disalurkan	655611 Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah	TAHAP 1	499.500.000,00	0,00	499.500.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 26-02-2025
72	25 Februari 2025	DAK NF 006 Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas yang disalurkan	654711 Dana Bantuan Operasional Kesehatan	TAHAP 1	1.940.739.000,00	214.366.386,00	1.726.372.614,00	0,00	SP2D	Diterima: 25-02-2025
73	24 Februari 2025	DAK NF 022 Alokasi Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah yang disalurkan	655511 Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	TAHAP 1	2.320.000.000,00	0,00	2.320.000.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 24-02-2025
74	19 Februari 2025	DAK NF 007 Alokasi Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang disalurkan	654712 Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	TAHAP 1	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 19-02-2025
75	12 Februari 2025	BOSP 001 Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang disalurkan	654311 Dana Bantuan Operasional Sekolah	Tahap 1	1.822.465.000,00	0,00	1.822.465.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 12-02-2025
76	22 Januari 2025	BOSP 001 Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang disalurkan	654311 Dana Bantuan Operasional Sekolah	Tahap 1	97.936.734.000,00	0,00	97.936.734.000,00	0,00	SP2D	Diterima: 22-01-2025
	JUMLAH				**454.382.286.638,00**	**10.207.095.522,00**	**444.175.191.116,00**	**0,00**		

LAMPIRAN 1D

REKAPITULASI REALISASI INSENTIF FISKAL

No	Tanggal	Jenis Dana	Uraian	Periode	Nilai Kotor	Potongan	Nilai Bersih	Tunda	Status	LKT
1	25 November 2025	Insentif Fiskal 005 Alokasi Insentif Fiskal Kinerja tahun sebelumnya yang disalurkan	643111 Dana Insentif Daerah	TAHAP 2	11.618.078.500,00	0,00	11.618.078.500,00	0,00	SP2D	Diterima: 25-11-2025
2	26 Mei 2025	Insentif Fiskal 005 Alokasi Insentif Fiskal Kinerja tahun sebelumnya yang disalurkan	643111 Dana Insentif Daerah	TAHAP 1	11.618.078.500,00	0,00	11.618.078.500,00	0,00	SP2D	Diterima: 26-05-2025
			JUMLAH		**23.236.157.000,00**	**0,00**	**23.236.157.000,00**	**0,00**		

LAMPIRAN 2A

REKAPITULASI PENERIMA HIBAH DANA BOSP TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	NILAI	DASAR PENYALURAN	TANGGAL
1	DIKMEN SWASTA (SMA)	8.517.545.000,00	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 204/PMK.07/2022 TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK	21 Desember 2022
	DIKMEN SWASTA (SMK)	9.423.490.000,00		
	DIKSUS SWASTA (SLB)	2.542.550.000,00		
	TOTAL DANA BOS TAHAP I	**20.483.585.000,00**		
2	DIKMEN SWASTA (SMA)	7.098.920.388,00		
	DIKMEN SWASTA (SMK)	8.676.393.953,00		
	DIKSUS SWASTA (SLB)	2.394.159.525,00		
	TOTAL DANA BOSP TAHAP II	**18.169.473.866,00**		
	TOTAL DANA BOSP TAHUN 2025	**38.653.058.866,00**		

LAMPIRAN 2B

REKAPITULASI PENERIMA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JENIS BELANJA HIBAH	NAMA PENERIMA HIBAH		NILAi (Rp)	SK PENERIMA HIBAH			NPHD	
					NOMOR	TANGGAL	SK KEPALA DAERAH / KEPALA OPD / LAINNYA	NOMOR	KETERANGAN
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		**11.604.230.000,00**					
A.	**Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat**	1	KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU	1.500.000.000,00	43 TAHUN 2025	02 January 2025	SK GUBERNUR	Nomor 04/NPHD/KESBANGPOL-WASNAS/VI/2025 Nomor 01/PERJAMA-HIBAH/VI/2025	
		2	KOMANDO GABUNGAN WILAYAH PERTAHANAN I	500.000.000,00	43 TAHUN 2025	02 January 2025	SK GUBERNUR	Nomor 04/NPHD/KESBANGPOL-WASNAS/VI/2025 Nomor 01/PERJAMA-HIBAH/VI/2025	
		3	PANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN IV BATAM	500.000.000,00	43 TAHUN 2025	02 January 2025	SK GUBERNUR	Nomor 03/NPHD/KESBANGPOL-WASNAS/I/2025 Nomor 01/HIBAH/I/2025	
		4	KOMITE INTELIJENDAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	500.000.000,00	43 TAHUN 2025	02 January 2025	SK GUBERNUR	Nomor 01/NPHD/KESBANGPOL/I/2025 Nomor 1/HIBAH/KOMINDA-KEPRI/I2025	
		5	PANGKALAN TNI AU RAJA HAJI FISABILLAH	500.000.000,00	43 TAHUN 2025	02 January 2025	SK GUBERNUR	Nomor 07/NPHD/KESBANGPOL/IV/2025 Nomor B/01/HIBAH IV/2025	
		6	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU	500.000.000,00	43 TAHUN 2025	02 January 2025	SK GUBERNUR	Nomor 03/NPHD/KESBANGPOL-KETMI/VII/2025 Nomor B/07/VII/Ka/PR.02.03/2025/BNNP	2 TAHAP
B.	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	1	FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) PROVINSI KEPULAUAN RIAU	200.000.000,00	43 TAHUN 2025	02 January 2025	SK GUBERNUR	Nomor 03/NPHD/KESBANGPOL/I/2025 Nomor 01/HIBAH/FKDM-KEPRI/I/2025	2 TAHAP
		2	FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME (FKPT) PROVINSI KEPULAUAN RIAU	200.000.000,00	43 TAHUN 2025	02 January 2025	SK GUBERNUR	Nomor 02/NPHD/KESBANGPOL-WASNAS/I/2025 Nomor 01/HIBAH/FKPT-KEPRI/I/2025	2 TAHAP
		3	MARKAS DAERAH LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	300.000.000,00	43 TAHUN 2025	02 January 2025	SK GUBERNUR	Nomor 04/NPHD/KESBANGPOL/III/2025 Nomor 12/MDLV/III/2025	2 TAHAP
		4	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) PROVINSI KEPULAUAN RIAU	500.000.000,00	43 TAHUN 2025	02 January 2025	SK GUBERNUR	Nomor 10/NPHD/KESBANGPOL/IV/2025 Nomor 07/FKUB-KEPRI/IV/2025	2 TAHAP
		5	FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (PFK) PROVINSI KEPULAUAN RIAU	200.000.000,00	43 TAHUN 2025	02 January 2025	SK GUBERNUR	Nomor 10/NPHD/KESBANGPOL-IDWASBANG/IV/2025 Nomor 006/FPK-KEPRI/IV/2025	1 TAHAP
C.	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	1	YAYASAN BINA BERKAH LESTARI	300.000.000,00	43 TAHUN 2025	02 January 2025	SK GUBERNUR	Nomor 01/NPHD/KESBANGPOL-KETMI/VI/2025 Nomor 02/BBL/VI/2025	1 TAHAP
		2	HIMPUNAN MASYARAKAT NIAS INDONESIA KOTA TANJUNGPINANG	200.000.000,00	43 TAHUN 2025	02 January 2025	SK GUBERNUR	Nomor 05/NPHD/KESBANGPOL-KETMI/VII/2025 Nomor 08/DPC-HIMNI/TPI/VII/2025	1 TAHAP
		3	YAYASAN BERKAT NUSANTARA KEPRI	100.000.000,00	43 TAHUN 2025	02 January 2025	SK GUBERNUR	Nomor 06/NPHD/KESBANGPOL-KETMI/VII/2025 Nomor 06/YBNK/2025	1 TAHAP
		4	PERKUMPULAN KELUARGA LEMBATA KOTA TANJUNGPINANG	100.000.000,00	43 TAHUN 2025	02 January 2025	SK GUBERNUR	Nomor 02/NPHD/KESBANGPOL-KETMI/VII/2025 Nomor 002/MTL/PKL/VII/2025	1 TAHAP
		5	IKATAN KELUARGA KAWANUA TANJUNGPINANG – KEPULAUAN RIAU	40.000.000,00	43 TAHUN 2025	02 January 2025	SK GUBERNUR	Nomor 04/NPHD/KESBANGPOL-KETMI/VII/2025 Nomor 04/IKK/NPHD/VII/2025	1 TAHAP
		6	DPW GABUNGAN LEMBAGA ANTI KORUPSI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	100.000.000,00	43 TAHUN 2025	02 January 2025	SK GUBERNUR	Nomor 07/NPHD/KESBANGPOL-KETMI/VIII/2025 Nomor 06/DPW-GALAXI/VIII/2025	1 TAHAP

NO.	JENIS BELANJA HIBAH	NAMA PENERIMA HIBAH		NILAi (Rp)	SK PENERIMA HIBAH			NPHD	
					NOMOR	TANGGAL	SK KEPALA DAERAH / KEPALA OPD / LAINNYA	NOMOR	KETERANGAN
		7	MAJELIS DAERAH KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM KABUPATEN BINTAN	45.000.000,00	488 TAHUN 2025	25 Maret 2025	SK GUBERNUR	Nomor 08/NPHD/KESBANGPOL-KETMI/IX/2025 Nomor 007/B/KAHMI-BINTAN/2025	1 TAHAP
		8	PUNGUAN SIMBOLON DOHOT BORUNA INDONESIA (PSBI) WILAYAH BATAM	100.000.000,00	43 TAHUN 2025	02 January 2025	SK GUBERNUR	Nomor 09/NPHD/KESBANGPOL-KETMI/X/2025 Nomor 012/SP-NPHD-PSBI/BTM/X/2025	1 TAHAP
		9	PIMPINAN CABANG IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH TANJUNGPINANG	100.000.000,00	1102 TAHUN 2025	13 Oktober 2025	SK GUBERNUR	Nomor 10/NPHD/KESBANGPOL-KETMI/X/2025 Nomor 029/A-9/XXX/2025	1 TAHAP
D.	**Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**	1	Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (DPD Gerindra)	880.830.000,00	195 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR		
		2	Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (DPD Golkar)	774.530.000,00	195 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR		
		3	Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat (DPW NasDem)	748.905.000,00	195 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR		
		4	Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS)	587.725.000,00	195 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR		
		5	Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP)	572.410.000,00	195 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR		
		6	Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD DEMOKRAT)	402.990.000,00	195 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR		
		7	Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB)	333.615.000,00	195 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR		
		8	Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN)	316.970.000,00	195 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR		
		9	Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI)	174.970.000,00	195 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR		
		10	Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (DPD HANURA)	174.470.000,00	195 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR		
		11	Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW PERINDO)	151.815.000,00	195 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR		
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		**2.760.000.000,00**					
Belanja Hibah Uang kepada Koperasi		1	Koperasi Konsumen Serba Usaha Antara	45.000.000,00	936 TAHUN 2025	22 August 2025	SK GUBERNUR	1541/NPHD/DKUKM/HD/IX/2025 dan 01/NPHD/KOP/IX/2025	
		2	Koperasi Maju Berkah Solusi	135.000.000,00	936 TAHUN 2025	22 August 2025	SK GUBERNUR	1540/NPHD/DKUKM/HD/IX/2025 dan 01/NPHD/KMBS/IX/2025	
		3	Koperasi Konsumen Tumbuh Tangguh Maju	170.000.000,00	1131 TAHUN 2025	21 October 2025	SK GUBERNUR	1772/NPHD/DKUKM/HD/X/2025 dan 01/NPHD/KTTM/10/2025	
		4	Koperasi Kelurahan Merah Putih Sungai Lumpur	200.000.000,00	1131 TAHUN 2025	21 October 2025	SK GUBERNUR	1773/NPHD/DKUKM/HD/X/2025 dan 01/NPHD/KKMP-SL/X/2025	
		5	Koperasi Desa Merah Putih Kuala Sempang	200.000.000,00	1131 TAHUN 2025	21 October 2025	SK GUBERNUR	1774/NPHD/DKUKM/HD/X/2025 dan 01/NPHD/KDMP-KS/10/2025	
		6	Koperasi Kelurahan Merah Putih Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau	200.000.000,00	1131 TAHUN 2025	21 October 2025	SK GUBERNUR	1775/NPHD/DKUKM/HD/X/2025 dan 01/NPHD/MKP-AIR.RAJA/X/2025	
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		1	KELOMPOK PENGUSAHA KECIL MENENGAH KOTA TANJUNGPINANG	1.240.000.000,00	958 TAHUN 2025	29 Agustus 2025	SK GUBERNUR	01/NPHD/DKUKM/IX/2025	
		2	PERKUMPULAN SRIKANDI KREATIF INDONESIA (PERSIKINDO) PROVINSI KEPULAUAN RIAU	50.000.000,00	958 TAHUN 2025	29 Agustus 2025	SK GUBERNUR	02/NPHD/DKUKM/IX/2025	
		3	YAYASAN TAMAR SEJAHTERA GEMILANG	520.000.000,00	1203 TAHUN 2025	14 November 2025	SK GUBERNUR	03/NPHD/DKUKM/XI/2025	
		DINAS SOSIAL		**455.000.000,00**					

NO.	JENIS BELANJA HIBAH	NAMA PENERIMA HIBAH		NILAi (Rp)	SK PENERIMA HIBAH			NPHD	
					NOMOR	TANGGAL	SK KEPALA DAERAH / KEPALA OPD / LAINNYA	NOMOR	KETERANGAN
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan		1	LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKKS) PROVINSI KEPULAUAN RIAU	45.000.000,00	541 TAHUN 2025	22 April 2025	SK GUBERNUR	Nomor 460/80.1/DINSOS/2025 Nomor 010/V/LKKS-KEPRI/2025	
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		1	YAYASAN LAUTAN BIRU SELINGSING KABUPATEN LINGGA	120.000.000,00	541 TAHUN 2025	22 April 2025	SK GUBERNUR	Nomor 460/81.1/DINSOS/2025 Nomor 04/PB-007/IV/Y-LBS/V/2025	
		2	YAYASAN LENTERA HATI GURINDAM KOTA TANJUNGPINANG	290.000.000,00	1143 TAHUN 2025	24 Oktober 2025	SK GUBERNUR	Nomor 460/137.1/DINSOS/2025 Nomor 05/Sek.YLHG/X/2025	
		DINAS KESEHATAN		**799.770.460,00**					
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		1	PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA BATAM	700.000.000,00	286 TAHUN 2025	06 Februari 2025	SK GUBERNUR	Nomor 144/HIBAH/VII/2025 Nomor 152/01.010.02/VII/2025	
		2	KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	99.770.460,00	1115 TAHUN 2025	17 Oktober 2025	SK GUBERNUR	Nomor 190/NPHD-DINKES/X/2025 Nomor 27/KPAP-KEPRI/NH/X/2025	
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		**9.136.580.665,00**					
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		1	NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (NPCI) PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1.000.000.000,00	130 Tahun 2025	07 January 2025	SK KEPALA DAERAH	903/002/DISPORA/HIBAH/IV/2025	
		2	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PROVINSI KEPULAUAN RIAU	6.323.752.775,00	130 Tahun 2025	07 January 2025	SK KEPALA DAERAH	903/001/DISPORA/HIBAH/IV/2025	2 TAHAP
		3	KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA KEPRI	812.965.690,00	130 Tahun 2025	07 January 2025	SK KEPALA DAERAH	903/004/DISPORA/HIBAH/VI/2025	2 TAHAP
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		1	FEDERASI SENI PANAHAN TRADISIONAL INDONESIA (FESPATI)	200.000.000,00	130 Tahun 2025	07 January 2025	SK KEPALA DAERAH	903/005/DISPORA/HIBAH/VI/2025	
		2	PSSI KEPRI	499.862.200,00	130 Tahun 2025	07 January 2025	SK KEPALA DAERAH	903/003/DISPORA/HIBAH/V/2025	
		3	ORGANISASI BANDUNG KARATE CLUB PROVINSI KEPULAUAN RIAU	200.000.000,00	1091 Tahun 2025	9 Oktober 2025	SK KEPALA DAERAH	903/009/DISPORA/HIBAH/X/2025	
		4	IKATAN TIONGHOA MUDA	100.000.000,00	130 Tahun 2025	9 Oktober 2025	SK KEPALA DAERAH	903/002/DISPORA-B1/HIBAH/2025	
		DINAS PENDIDIKAN		**45.000.000,00**					
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		1	ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA	45.000.000,00	534 TAHUN 2025	18 April 2025	SK GUBERNUR	Nomor 001/DISDIK/NPHD/2025 Nomor 004/APSI-PROV/VII/2025	
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		**80.000.000,00**					
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		1	Ketua RT 001 RW 008 Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang	25.000.000,00	795 Tahun 2025	9 Juli 2025	SK GUBERNUR	001/DPMDDUKCAPIL/NPHD/2025	
		2	Ketua PKK Kelurahan Kampung Bulang	30.000.000,00	795 Tahun 2025	9 Juli 2025	SK GUBERNUR	002/DPMDDUKCAPIL/NPHD/2025	
		3	Ketua RT 001 RW 005 Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang	25.000.000,00	795 Tahun 2025	9 Juli 2025	SK GUBERNUR	003/DPMDDUKCAPIL/NPHD/2025	
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		**560.000.000,00**					
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		1	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Riau	560.000.000,00	83 TAHUN 2025	03 January 2025	SK GUBERNUR	Nomor 900.1.3.2/2/DKI/2025 Nomor 003/KPID-KEPRI/IV/2025	
		DINAS KEBUDAYAAN		**1.500.000.000,00**					
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		1	LEMBAGA ADAT MELAYU KEPULAUAN RIAU	1.000.000.000,00	411 TAHUN 2025	06 March 2025	SK GUBERNUR	020.1/001/DISBUD/5,0/NPHD/ 2025 01/NPHD/LAM- KEPRI/III/2025	3 TAHAP
		2	LEMBAGA ADAT MELAYU KEPULAUAN RIAU KABUPATEN LINGGA	100.000.000,00	411 TAHUN 2025	06 March 2025	SK GUBERNUR	B/430/60 DISBUD/5.0/NPHD/2025 01/NPHD/LAM- KL/X/2025	
		3	YAYASAN BANGUN BUDHOYO SAKTI	400.000.000,00	411 TAHUN 2025	06 March 2025	SK GUBERNUR	020.1/003/DISBUD/4.1/NPHD/ 2025 036/NPHD/Y.BBS/V/2025	2 TAHAP
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		**90.000.000,00**					

NO.	JENIS BELANJA HIBAH		NAMA PENERIMA HIBAH	NILAi (Rp)	SK PENERIMA HIBAH			NPHD	
					NOMOR	TANGGAL	SK KEPALA DAERAH / KEPALA OPD / LAINNYA	NOMOR	KETERANGAN
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		1	KELOMPOK TANI HUTAN MANDIRI BERSAMA KOTA BATAM	90.000.000,00	233 TAHUN 2025	22 January 2025	SK GUBERNUR	Nomor B/100.2.2/506/NPHD/DLHK-04/2025 Nomor 001/NPH/KTHMB/V/2025	
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		**44.560.156.275,00**					
A.	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	1	LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2.401.698.525,00	191 TAHUN 2025	15 January 2025	SK GUBERNUR	128/NPHD1-KESRA/V/2025	2 TAHAP
		2	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1.100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 January 2025	SK GUBERNUR	45/NPHD1-KESRA/II/2025	2 TAHAP
		3	BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) PROVINSI KEPULAUAN RIAU	150.000.000,00	157 TAHUN 2025	14 April 2025	SK GUBERNUR	219/NPHD1-KESRA/X/2025	
		4	MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI KEPULAUAN RIAU	500.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 January 2025	SK GUBERNUR	27/NPHD1-KESRA/II/2025	
B.	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	1	AL- BARZANZI BABUSSALAM	16.100.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	200/NPHD1-KESRA/IX/2025	
		2	MAJELIS TA'LIM BABUSSALAM	7.200.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	198/NPHD1-KESRA/IX/2025	
		3	TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ) QUR'AN CENTRE	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	44/NPHD1-KESRA/II/2025	
		4	MAJELIS TAKLIM AL-KHAIROT	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	60/NPHD1-KESRA/III/2025	
		5	MAJELIS TA'LIM ASSURUUR	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	61/NPHD1-KESRA/III/2025	
		6	MAJELIS TAKLIM ISTIQOMAH AZ-ZIKRO	30.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	59/NPHD1-KESRA/3/2025	
		7	MAJELIS TAKLIM SAHATA HITA SASUDENA	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	16/NPHD1-KESRA/II/2025	
		8	TPA NURHAYATI	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	12/NPHD1-KESRA/II/2025	
		9	PENDIDIKAN ANAK USIA DININAL - QUR'AN (PAUDQ) BAITURRAHIM	50.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	109/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		10	TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ) NURUL AZZAM	50.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	126/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		11	TPQ BAHRUL ULUM	25.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	186/NPHD1-KESRA/VIII/2025	
		12	MAJELIS TAKLIM DARUSSALAM	30.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	178/NPHD1-KESRA/VII/2025	
		13	MAJELIS TAQLIM MASJID NURUDDIN	30.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	213/NPHD1-KESRA/IX/2025	
		14	MAJLIS TA'LIM HIDAYATUL MUSLIMAH	25.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	146/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		15	MAJELIS TAKLIM AL - AMANAH	25.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	123/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		16	TPQ AL-AMIN	30.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	179/NPHD1-KESRA/VII/2025	
		17	MAJELIS TAKLIM MASJID NURUL IKHSAN	30.000.000,00	1107 TAHUN 2025	15 Oktober 2025	SK GUBERNUR	305/NPHD1-KESRA/XI/2025	
C.	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	1	MASJID AL- AMIN	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	254/NPHD1-KESRA/XI/2025	TAHAP I
		2	MASJID AL-FALAH	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	252/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		3	MASJID AL-HIDAYAH	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	251/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		4	MASJID AL-HIDAYAH	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	250/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		5	MASJID AL-HIKMAH	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	253/NPHD1-KESRA/X/2025	
		6	SURAU NURUL AMIN	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	248/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		7	SURAU HUSNUL KHATIMAH	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	255/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		8	SURAU DARUL IMAN	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	249/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		9	SURAU AR-ROHMAN	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	231/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		10	SURAU AR RAHMAN	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	217/NPHD1-KESRA/X/2025	
		11	YAYASAN ANAMBAS CAHAYA PERBATASAN	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	201/NPHD1-KESRA/IX/2025	
		12	SURAU AL-FALAH	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	256/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		13	DEWAN PIMPINAN DAERAHA (DPD) GENERASI MUDA MATHA'UL ANWAR KOTA BATAM	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	05/NPHD1-KESRA/II/2025	
		14	MASJID MAMBAUL HIKMAH	200.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	77/NPHD1-KESRA/III/2025	
		15	MASJID SHIROTOL MUSTAQIM	200.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	73/NPHD1-KESRA/III/2025	
		16	YAYASAN IBU BAHAGIA BATAM	2.000.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	138/NPHD1-KESRA/IV/2025	2 TAHAP
		17	MASJID AL IKHLAS	75.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	158/NPHD1-KESRA/VII/2025	
		18	MASJID NURUL YAQIN	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	119/NPHD1-KESRA/III/2025	
		19	YAYASAN BUNDA CERDAS BERDIKARI	150.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	88/NPHD1-KESRA/III/2025	

NO.	JENIS BELANJA HIBAH	NAMA PENERIMA HIBAH		NILAi (Rp)	SK PENERIMA HIBAH			NPHD	
					NOMOR	TANGGAL	SK KEPALA DAERAH / KEPALA OPD / LAINNYA	NOMOR	KETERANGAN
		20	MASJID AL ANSHAR	1.000.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	47/NPHD1-KESRA/II/2025	2 TAHAP
		21	MASJID MIFTAHUL JANNAH	196.589.300,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	199/NPHD1-KESRA/IX/2025	
		22	MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA NURUL IMAN	300.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	239/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		23	MASJID AL KAUTSAR	578.500.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	184/NPHD1-KESRA/VIII/2025	
		24	MUSHOLLA DARUL HIKMAH	21.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	214/NPHD1-KESRA/IX/2025	
		25	MASJID AL - IKHLAS	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	224/NPHD1-KESRA/X/2025	
		26	MASJID SITI MARYAM	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	220/NPHD1-KESRA/X/2025	
		27	MASJID AL - MUTTAQIN	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	63/NPHD1-KESRA/III/2025	
		28	YAYASAN ISLAM CENDEKIA AR-ROZAN	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	172/NPHD1-KESRA/VII/2025	
		29	YAYASAN LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ (LMI) UKHUWAH ISLAMIYAH KEPULAUAN RIAU	500.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	92/NPHD1-KESRA/III/2025	
		30	YAYASAN REKAN RELAWAN UMAT WILAYAH KEPULAUAN RIAU	400.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	167/NPHD1-KESRA/VII/2025	
		31	YAYASAN RUMAH BELAJAR INSAN CENDIKIA BATAM	150.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	127/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		32	YAYASAN TAMAN RAUDOH AL HASANI	150.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	116/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		33	YAYASAN TANJAK MELAYU BERMARWAH NUSANTARA	500.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	118/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		34	MASJID BAITURROZZAQ	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	105/NPHD1-KESRA/III/2025	
		35	MASJID RUMAISYAH	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	194/NPHD1-KESRA/IX/2025	
		36	BANUA KERISO PROTESTAN NIAS (BKPN) JEMAAT DIASPORA BATAM	200.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	90/NPHD1-KESRA/III/2025	
		37	MUSHOLLA AL-IKHLAS	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	102/NPHD1-KESRA/III/2025	
		38	YAYASAN AR RAUDHAH	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	115/NPHD1-KESRA/III/2025	
		39	YAYASAN BAITUL 'AZHIM	150.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	53/NPHD1-KESRA/II/2025	
		40	MASJID AL-MUTHMAINNAH	150.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	48/NPHD1-KESRA/II/2025	
		41	MASJID BAITUL HUDA	250.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	153/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		42	MASJID AL-MANSYURIN	250.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	151/NPHD1-KESRA/III/2025	
		43	GEREJA HURIA KRISTEN INDONESIA (HKI) RESORT KHUSUS MANGSANG	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	247/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		44	MASJID AINUL YAQIN	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	135/NPHD1-KESRA/V/2025	
		45	MASJID AL IKHLAS	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	134/NPHD1-KESRA/V/2025	
		46	MASJID AL MUHAJIRIN	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	136/NPHD1-KESRA/5/2025	
		47	MASJID NURUL JANNAH	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	133/NPHD1-KESRA/V/2025	
		48	MASJID AL MUHAJIRIN	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	132/NPHD1-KESRA/V/2025	
		49	MUSHOLLA HUSNUL KHOTIMAH	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	131/NPHD1-KESRA/V/2025	
		50	YAYASAN DARUSALAM	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	137/NPHD1-KESRA/V/2025	
		51	YAYASAN PEDULI UMAT BATAM	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	120/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		52	YAYASAN PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN AL QURAN QURAN CENTRE	500.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	41/NPHD1-KESRA/II/2025	
		53	MASJID ATH - THOYYIBAH	220.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	40/NPHD1-KESRA/III/2025	
		54	MASJID AL FATTAH	50.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	70/NPHD1-KESRA/III/2025	
		55	MASJID NURUL YAQIN	75.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	75/NPHD1-KESRA/III/2025	
		56	MASJID RIYADUL JANNAH	75.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	71/NPHD1-KESRA/III/2025	
		57	MASJID AN NUR	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	62/NPHD1-KESRA/III/2025	
		58	YAYASAN BAITURRAHIM PONDOK PELANGI	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	52/NPHD1-KESRA/II/2025	
		59	YAYASAN NUR HIKMAH GREEN MANSION	75.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	58/NPHD1-KESRA/III/2025	
		60	YAYASAN JAMI' DARUL IHSAN	75.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	65/NPHD1-KESRA/III/2025	
		61	YAYASAN BAITUSSALAM TIBAN	75.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	54/NPHD1-KESRA/II/2025	
		62	MASJID AL MUKHLASIN	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	197/NPHD1-KESRA/IX/2025	
		63	YAYASAN BAITUL QUR'AN INTERNASIONAL	200.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	24/NPHD1-KESRA/II/2025	
		64	YAYASAN HASYIM ASY'ARI BATAM	200.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	22/NPHD1-KESRA/II/2025	
		65	MASJID QUBA	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	50/NPHD1-KESRA/II/2025	
		66	YAYASAN WAKAF AL MUTTAQIN BATAM KEPULAUAN RIAU	200.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	107/NPHD1-KESRA/III/2025	
		67	YAYASAN JANNATUL ILMI KEPRI	350.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	66/NPHD1-KESRA/III/2025	

NO.	JENIS BELANJA HIBAH	NAMA PENERIMA HIBAH		NILAi (Rp)	SK PENERIMA HIBAH			NPHD	
					NOMOR	TANGGAL	SK KEPALA DAERAH / KEPALA OPD / LAINNYA	NOMOR	KETERANGAN
		68	YAYASAN AL MUTTAQIN MANDIRI PELUNGGUT BATAM	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	72/NPHD1-KESRA/III/2025	
		69	YAYASAN AL HUDA BATAM	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	76/NPHD1-KESRA/III/2025	
		70	MASJID BAITUL HAMDI	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	17/NPHD1-KESRA/II/2025	
		71	GEREJA PANTEKOSTA ISA ALMASIH (GPIA) JEHOVAH JIREH	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	07/NPHD1-KESRA/II/2025	
		72	MASJID AL KAUTSAR	50.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	225/NPHD1-KESRA/X/2025	
		73	GEREJA BETHEL INDONESIA (GBI) PURITY BLESSING	30.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	79/NPHD1-KESRA/III/2025	
		74	GEREJA BETHEL INDONESIA (GBI) PARADISE	30.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	78/NPHD1-KESRA/III/2025	
		75	MAJELIS PIMPINAN WILAYAH FORUM SILATURRAHMI TA'MIR MASJID DAN MUSHOLLA INDONESIA ASWAJA (MPW FAHMITAMAMI ASWAJA) KEPULAUAN RIAU	50.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	69/NPHD1-KESRA/III/2025	
		76	MASJID AL HIKMAH	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	25/NPHD1-KESRA/II/2025	
		77	MASJID NURUL HUDA	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	49/NPHD1-KESRA/II/2025	
		78	MASJID AN - NUR	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	10/NPHD1-KESRA/II/2025	
		79	MASJID AN-NUR	30.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	09/NPHD1-KESRA/II/2025	
		80	MASJID AR-RAHMAN	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	20/NPHD1-KESRA/II/2025	
		81	MASJID AT-TAQWA	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	06/NPHD1-KESRA/II/2025	
		82	MASJID JAMI' BALOI CENTRE	50.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	21/NPHD1-KESRA/II/2025	
		83	YAYASAN DARUL FIKRI MARINA BATAM	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	18/NPHD1-KESRA//2025	
		84	MASJID NURUL IMAN	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	51/NPHD1-KESRA/II/2025	
		85	YAYASAN ANZALAS SAKINAH	80.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	12/NPHD1-KESRA/II/2025	
		86	MUSHOLLA RIYADHUS SHALIHIN NURUL HUDA	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	15/NPHD1-KESRA/II/2025	
		87	MUSHALLA ISTIQOMAH	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	08/NPHD1-KESRA/II/2025	
		88	PONDOK PESANTREN ISLAMIC CENTRE NAHDHATUL WATHAN	30.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	34/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		89	PW NAHDLATUL ULAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	300.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	86/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		90	YAYASAN AL MUSLIMIN SEI LANGKAI BATAM	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	03/NPHD1-KESRA/II/2025	
		91	YAYASAN SHOUTUL MURABBI IKHWAN	70.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	13/NPHD1-KESRA/II/2025	
		92	YAYASAN AL-AMANI BATAM	70.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	14/NPHD1-KESRA/II/2025	
		93	YAYASAN FUSPAQ BATAM	70.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	02/NPHD1-KESRA/II/2025	
		94	YAYASAN FAJAR CENDIKIA BATAM	70.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	11/NPHD1-KESRA/II/2025	
		95	YAYASAN AL-HAFIDZ BATAM	70.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	26/NPHD1-KESRA/II/2025	
		96	YAYASAN MANBAU AL HIKMAH	75.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	64/NPHD1-KESRA/III/2025	
		97	YAYASAN KASIH BETESDA KOTA BATAM	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	101/NPHD1-KESRA/III/2025	
		98	YAYASAN INSANI CAHAYA CEMERLANG	150.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	39/NPHD1-KESRA/III/2025	
		99	MASJID ATH THORIQ	150.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	19/NPHD1-KESRA/II/2025	
		100	YAYASAN HIJRAH INDONESIA KOTA BATAM	50.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	68/NPHD1-KESRA/III/2025	
		101	MASJID AL-JIHAD	30.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	185/NPHD1-KESRA/VIII/2025	
		102	MASJID AL AMAL	50.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	165/NPHD1-KESRA/VII/2025	
		103	MASJID IKHWANUL MU'MININ	200.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	112/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		104	MUSHOLLA RAUDHATUL IMAN	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	32/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		105	YAYASAN AL ASHRI BINTAN MADANI	80.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	160/NPHD1-KESRA/VII/2025	
		106	MASJID AL HASANAH	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	170/NPHD1-KESRA/VII/2025	
		107	MASJID FASTABIQUL KHAIRAT	50.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	74/NPHD1-KESRA/III/2025	
		108	MASJID JAMI' AL - HIDAYAH	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	166/NPHD1-KESRA/VII/2025	
		109	YAYASAN ISLAM AR-RAHMAN	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	188/NPHD1-KESRA/VIII/2025	
		110	YAYASAN MIFTAHUL HASANAH NOSARI BINTAN	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	169/NPHD1-KESRA/VII/2025	
		111	YAYASAN RAJA HAJI UMAR KEPULAUAN RIAU	80.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	94/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		112	MASJID AL MADINAH	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	130/NPHD1-1KESRA/VII/2025	
		113	SURAU MIFTAHUL JANNAH	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	171/NPHD1-KESRA//VII/2025	
		114	MUSHOLLA AL - IKHLAS	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	203/NPHD1-KESRA/IX/2025	
		115	MUSHALLA AL - ZULFATI	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	125/NPHD1-KESRA/IV/2025	

NO.	JENIS BELANJA HIBAH	NAMA PENERIMA HIBAH		NILAi (Rp)	SK PENERIMA HIBAH			NPHD	
					NOMOR	TANGGAL	SK KEPALA DAERAH / KEPALA OPD / LAINNYA	NOMOR	KETERANGAN
		116	MASJID AL AMIN	50.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	33/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		117	SURAU NURUL IKHWAN	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	175/NPHD1-KESRA/VII/2025	
		118	LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QURAN (LPTQ) KEC, SUGI BESAR KABUPATEN KARIMUN	75.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	43/NPHD1-KESRA/II/2025	
		119	MASJID DARUSSALAM	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	208/NPHD1-KESRA/IX/2025	
		120	MASJID NURUL IMAN	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	181/NPHD1-KESRA/VII/2025	
		121	YAYASAN NUR ATTHOHIR	400.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	162/NPHD1-KESRA/VII/2025	
		122	YAYASAN AL - ISHLAH KABUPATEN KARIMUN	950.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	38/NPHD1-KESRA/III/2025	2 TAHAP
		123	MASJID RAJA HAJI ABDUL GHANI	60.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	237/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		124	MUSHALLA AL - IMAN	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	23/NPHD1-KESRA/II/2025	
		125	MASJID BAITURRAHMAN	60.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	234/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		126	MASJID BAITUT TAQWA	50.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	241/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		127	MASJID AL-KHURIYAH	50.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	212/NPHD1-KESRA/IX/2025	
		128	MASJID AL FALAH	50.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	210/NPHD1-KESRA/IX/2025	
		129	YAYASAN MASJID ASHABIL QUR'AN	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	42/NPHD1-KESRA/II/2025	
		130	MASJID AN NI'MAH	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	56/NPHD1-KESRA/III/2025	
		131	PONDOK PESANTREN DARU TAHFIDZIL QUR'AN WAS SUNNAH MIFTAHUL ULUM	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	85/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		132	MASJID BAITUT TAQWA	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	229/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		133	MASJID AL MUTTAQIN	30.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	193/NPHD1-KESRA/VIII/2025	
		134	YAYASAN INSAN MADANI LINGGA	450.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	183/NPHD1-KESRA/VIII/2025	
		135	YAYASAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH AS SALAM	400.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	150/NPHD1-KESRA/III/2025	
		136	LEMBAGA PEDULI MASYARAKAT LINGGA	250.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	149/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		137	YAYASAN JALIL ADZ DZIKRI	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	122/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		138	MASJID AN-NUR	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	230/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		139	MASJID AS -SALAM	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	196/NPHD1-KESRA/IX/2025	
		140	MASJID AT TAQWA	50.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	209/NPHD1-KESRA/IX/2025	
		141	MASJID AT-TAQWA	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	36/NPHD1-KESRA/III/2025	
		142	MASJID BABUL IKHLAS	50.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	189/NPHD1-KESRA/VIII/2025	
		143	MASJID NURUL FALAH	50.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	141/NPHD1-KESRA/V/2025	
		144	MASJID NURUL JANNAH	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	35/NPHD1-KESRA/III/2025	
		145	MASJID NURUL IMAN	50.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	37/NPHD1-KESRA/III/2025	
		146	MASJID NURUL HAQ	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	192/NPHD1-KESRA/VIII/2025	
		147	MASJID AL QALAM	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	80/NPHD1-KESRA/III/2025	
		148	MUSHOLLA AL BAROKAH	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	190/NPHD1-KESRA/VIII/2025	
		149	SURAU AL-HIDAYAH	50.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	147/NPHD1-KESRA/V/2025	
		150	YAYASAN AL IBTISAM WASSURUR LINGGA	50.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	244/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		151	MASJID AL JANATUL MUTTAQIN	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	148/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		152	SURAU BABUL ATIEQ	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	191/NPHD1-KESRA/VIII/2025	
		153	MASJID AL HIJRAH	150.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	114/NPHD1-KESRA/III/2025	
		154	MASJID AN-NUSHUR	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	216/NPHD1-KESRA/IX/2025	
		155	MASJID AR-RAJA'A SELUAN	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	265/NPHD1-KESRA//XI/2025	
		156	MASJID BESAR AL FURQAN	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	187/NPHD1-KESRA/VIII/2025	
		157	MASJID AL-HIJRAH	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	226/NPHD1-KESRA/X/2025	
		158	MASJID BESAR TSAMARATUL INFAQ	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	267/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		159	MASJID AZ-ZURIAT	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	227/NPHD1-KESRA/X/2025	
		160	MASJID BAITUL HUDA	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	215/NPHD1-KESRA/IX/2025	
		161	MASJID RAUDHATUL FALAH	50.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	205/NPHD1-KESRA/IX/2025	
		162	MASJID RAUDHATUL MUTTAQIN	50.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	211/NPHD1-KESRA/IX/2025	
		163	MASJID SYA'IRILLAH	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	195/NPHD1-KESRA/IX/2025	
		164	MASJID AL-JAM'AN	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	259/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		165	MASJID AL-MA'ARIF	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	264/NPHD1-KESRA/XI/2025	

NO.	JENIS BELANJA HIBAH	NAMA PENERIMA HIBAH		NILAi (Rp)	SK PENERIMA HIBAH			NPHD	
					NOMOR	TANGGAL	SK KEPALA DAERAH / KEPALA OPD / LAINNYA	NOMOR	KETERANGAN
		166	MASJID AL-MIDROR	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	258/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		167	MASJID AL-MUHAJIRIN	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	261/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		168	MASJID AL-MUHAJIRIN	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	242/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		169	SURAU AL FALAH	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	202/NPHD1-KESRA/IX/2025	
		170	SURAU AL-FURQON	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	266/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		171	SURAU AL-JIHAD SAWAH	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	257/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		172	SURAU AL-JIHAD	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	243/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		173	SURAU AL-QANA'AH	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	260/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		174	SURAU AT- MUTTAQIN	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	262/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		175	SURAU BAITURRAHMAN	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	263/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		176	MASJID AL GHAFFAR	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	235/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		177	MASJID AL HUDA	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	67/NPHD1-KESRA/III/2025	
		178	MASJID AL HUDA	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	221/NPHD1-KESRA/X/2025	
		179	MASJID AL ISTIQAMAH	50.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	180/NPHD1-KESRA/VII/2025	
		180	MASJID AL MARHAMAH	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	268/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		181	MASJID AL MUBAROKAH	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	106/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		182	MASJID AN NASHRIYAH	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	145/NPHD1-KESRA/V/2025	
		183	MASJID AN NUR	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	143/NPHD1-KESRA/V/2025	
		184	MASJID AS - SAHL	80.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	55/NPHD1-KESRA/III/2025	
		185	MASJID ASY-SYUHADA	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	46/NPHD1-KESRA/II/2025	
		186	MASJID JAMI' AL-MUFLIHUN	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	121/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		187	MASJID AL-BAROKAH	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	236/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		188	MASJID AL-GHOFUR	50.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	31/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		189	MASJID AL-KAUTSAR	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	164/NPHD1-KESRA/VII/2025	
		190	MASJID HAJAR ASWAD	80.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	142/NPHD1-KESRA/VIII/2025	
		191	MASJID JABAL HIDAYAH	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	177/NPHD1-KESRA/VII/2025	
		192	MASJID NURUL HUDA	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	228/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		193	PENGURUS WILAYAH IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESI (PW-IPHI) PROVINSI KEPULAUAN RIAU	450.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	81/NPHD1-KESRA/III/2025	
		194	POLTEKKES KEMENKES (POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN) TANJUNGPINANG	947.682.750,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	204/NPHD1-KESRA/IX/2025	
		195	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH)	914.285.700,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	161/NPHD1-KESRA/VII/2025	2 TAHAP
		196	MASJID AMAR MAKRUF	150.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	245/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		197	GEREJA PRESBYTERIAN DI INDONESIA (GEPRIN) TANJUNGPINANG	125.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	159/NPHD1-KESRA/VII/2025	
		198	GSJA CWS TANJUNGPINANG	100.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	174/NPHD1-KESRA/VII//2025	
		199	MASJID AL-KARIM	30.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	111/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		200	YAYASAN DHARMA SASANA	150.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	246/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		201	YAYASAN BINA INSAN SAKINAH	1.000.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	83/NPHD1-KESRA/III/2025	2 TAHAP
		202	YAYASAN GANG QURAN INDONESIA	400.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	83/NPHD1-KESRA/III/2025	
		203	YAYASAN MUHAMMAD AL-FAATIH TANJUNGPINANG	1.200.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	89/NPHD1-KESRA/III/2025	2 TAHAP
		204	YAYASAN ULUL ILMI TANJUNGPINANG	300.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	82/NPHD1-KESRA/III/2025	
		205	BKMT KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA KOTA TANJUNGPINANG	50.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	157/NPHD1-KESRA/VII/2025	
		206	BKMT KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT	50.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	155/NPHD1-KESRA/V/2025	
		207	MASJID AL - AMIN	50.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	168/NPHD1-KESRA/VII/2025	
		208	MASJID AL FALAH	50.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	207/NPHD1-KESRA/IX/2025	
		209	YAYASAN HAKKA SEJAHTERA KEPUALUAN RIAU	700.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	233/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		210	MASJID AL IKHLAS	60.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	30/NPHD1-KESRA/II/2025	
		211	MASJID AS SANABIL	80.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	238/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		212	MASJID NURUL FALAH	60.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	182/NPHD1-KESRA/VII/2025	
		213	SURAU NURUL YASIN	60.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	91/NPHD1-KESRA/VII/2025	

NO.	JENIS BELANJA HIBAH	NAMA PENERIMA HIBAH		NILAi (Rp)	SK PENERIMA HIBAH			NPHD	
					NOMOR	TANGGAL	SK KEPALA DAERAH / KEPALA OPD / LAINNYA	NOMOR	KETERANGAN
		214	SURAU AL - AMANAH	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	29/NPHD1-KESRA/II/2025	
		215	MASJID AL MUHAJIRIN	60.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	93/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		216	MUSHALLA JAMIATUL KHAIRAT	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	28/NPHD1-KESRA/II/2025	
		217	MASJID AL FAJAR	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	223/NPHD1-KESRA/X/2025	
		218	MASJID JAMI AL JANNATUL MA'WA	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	156/NPHD1-KESRA/VII/2025	
		219	PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH PROV. KEPULAUAN RIAU	500.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	57/NPHD1-KESRA/III/2025	
		220	MASJID JAMI TISATUL AULIYA	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	232/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		221	MASJID USWATUN HASANAH	60.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	176/NPHD1-KESRA/VII/2025	
		222	MASJID AL AMIN	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	113/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		223	MUSHALLA SYARIFFA RAUDHAH	40.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	01/NPHD1-KESRA/II/2025	
		224	KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI) KEPRI	500.000.000,00	191 TAHUN 2025	15 Januari 2025	SK GUBERNUR	108/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		225	YAYASAN AL HIKMAH AT TAQWA ANAMBAS	1.000.000.000,00	157 TAHUN 2025	14 April 2025	SK GUBERNUR	97/NPHD1-KESRA/IV/2025	2 TAHAP
		226	PERSAUDARAAN MUSLIMAH (SALIMAH) BATAM BAITUL HASANAH	100.000.000,00	157 TAHUN 2025	14 April 2025	SK GUBERNUR	163/NPHD1-KESRA/VII//2025	
		227	YAYASAN HASANAH CENDEKIA BATAM	50.000.000,00	157 TAHUN 2025	14 April 2025	SK GUBERNUR	124/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		228	YAYASAN LEGENDA CENDEKIA MULIA	50.000.000,00	157 TAHUN 2025	14 April 2025	SK GUBERNUR	98/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		229	YAYASAN MUYASSAR UMAR RASYID BATAM	50.000.000,00	157 TAHUN 2025	14 April 2025	SK GUBERNUR	206/NPHD1-KESRA/IX/2025	
		230	MASJID NURUL HUDA	70.000.000,00	157 TAHUN 2025	14 April 2025	SK GUBERNUR	240/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		231	GEREJA HURIA KRISTEN INDONESIA (HKI)	753.550.000,00	157 TAHUN 2025	14 April 2025	SK GUBERNUR	104/NPHD1-KESRA/IV/2025	2 TAHAP
		232	YAYASAN KOMPUTER BATAM	1.753.550.000,00	157 TAHUN 2025	14 April 2025	SK GUBERNUR	103/NPHD1-KESRA/IV/2025	2 TAHAP
		233	YAYASAN BINTANG CENDEKIAWAN	200.000.000,00	157 TAHUN 2025	14 April 2025	SK GUBERNUR	100/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		234	YAYASAN INSAN MADANI PEDULI BATAM	200.000.000,00	157 TAHUN 2025	14 April 2025	SK GUBERNUR	99/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		235	YAYASAN AL MUBARAKAH NURHASANAH	150.000.000,00	157 TAHUN 2025	14 April 2025	SK GUBERNUR	139/NPHD1-KESRA/V/2025	
		236	PENGURUS WILAYAH HIMPAUDI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	200.000.000,00	157 TAHUN 2025	14 April 2025	SK GUBERNUR	96/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		237	YAYASAN MASJID AN-NAHDLAH BATAM	600.000.000,00	157 TAHUN 2025	14 April 2025	SK GUBERNUR	95/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		238	YAYASAN JABAL RAHMAH AL ISLAMI	80.000.000,00	157 TAHUN 2025	14 April 2025	SK GUBERNUR	222/NPHD1-KESRA/X/2025	
		239	MASJID AL HIJRAH	30.000.000,00	157 TAHUN 2025	14 April 2025	SK GUBERNUR	152/NPHD1-KESRA/VII/2025	
		240	MASJID BAHRUN ULUM	30.000.000,00	157 TAHUN 2025	14 April 2025	SK GUBERNUR	173/NPHD1-KESRA/VII/2025	
		241	MASJID AMALUSSHOLIHIN	34.000.000,00	157 TAHUN 2025	14 April 2025	SK GUBERNUR	144/NPHD1-KESRA/V/2025	
		242	BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM (BKMT) PROVINSI KEPULAUAN RIAU	800.000.000,00	157 TAHUN 2025	14 April 2025	SK GUBERNUR	154/NPHD1-KESRA/VI/2025	2 TAHAP
		243	DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD)PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD PROV. KEPULAUAN RIAU	500.000.000,00	157 TAHUN 2025	14 April 2025	SK GUBERNUR	129/NPHD1-KESRA/V/2025	
		244	LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI (PESPARAWI) DAERAH (LPPD) PROV. KEPULAUAN RIAU	1.000.000.000,00	157 TAHUN 2025	14 April 2025	SK GUBERNUR	110/NPHD1-KESRA/IV/2025	2 TAHAP
		245	YAYASAN GURINDAM EDUKASIA	192.000.000,00	157 TAHUN 2025	14 April 2025	SK GUBERNUR	117/NPHD1-KESRA/IV/2025	
		246	MASJID NUR FAIZIN	50.000.000,00	1107 TAHUN 2025	15 Oktober 2025	SK GUBERNUR	302/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		247	SURAU NURUL HIDAYAH	40.000.000,00	1107 TAHUN 2025	15 Oktober 2025	SK GUBERNUR	306/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		248	VIHARA VIMALAKIRTI SOKA BINTAN	100.000.000,00	1107 TAHUN 2025	15 Oktober 2025	SK GUBERNUR	308/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		249	SURUH MASJID AL-MUKMIN	30.000.000,00	1107 TAHUN 2025	15 Oktober 2025	SK GUBERNUR	300/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		250	YAYASAN BAHTERA INSANI	894.000.000,00	1107 TAHUN 2025	15 Oktober 2025	SK GUBERNUR	301/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		251	MASJID AL HIDAYAH	50.000.000,00	1107 TAHUN 2025	15 Oktober 2025	SK GUBERNUR	311/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		252	MASJID ASSHOBIRIN	30.000.000,00	1107 TAHUN 2025	15 Oktober 2025	SK GUBERNUR	312/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		253	MASJID MIFTAHUL JANNAH	50.000.000,00	1107 TAHUN 2025	15 Oktober 2025	SK GUBERNUR	315/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		254	MASJID NURUL HUDA	50.000.000,00	1107 TAHUN 2025	15 Oktober 2025	SK GUBERNUR	307/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		255	MASJID NURUL IMAN	30.000.000,00	1107 TAHUN 2025	15 Oktober 2025	SK GUBERNUR	310/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		256	MASJID NURUL YAQIN	100.000.000,00	1107 TAHUN 2025	15 Oktober 2025	SK GUBERNUR	313/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		257	SURAU BABUL IHSAN	40.000.000,00	1107 TAHUN 2025	15 Oktober 2025	SK GUBERNUR	304/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		258	GEREJA KATOLIK KRISTUS RAJA PAROKI HATI SANTA MARIA TAK BERNODA TANJUNGPINANG	200.000.000,00	1106 TAHUN 2025	15 Oktober 2025	SK GUBERNUR	218/NPHD1-KESRA/X/2025	
		259	VIHARA BUMI MAITERYA	240.000.000,00	1106 TAHUN 2025	15 Oktober 2025	SK GUBERNUR	314/NPHD1-KESRA/XI/2025	

NO.	JENIS BELANJA HIBAH	NAMA PENERIMA HIBAH		NILAi (Rp)	SK PENERIMA HIBAH			NPHD	
					NOMOR	TANGGAL	SK KEPALA DAERAH / KEPALA OPD / LAINNYA	NOMOR	KETERANGAN
		260	YAYASAN BADAN KERJASAMA PELAYANAN KASIH (BKPK)	300.000.000,00	1106 TAHUN 2025	15 Oktober 2025	SK GUBERNUR	303/NPHD1-KESRA/XI/2025	
		261	MASJID NURUL JANNAH	50.000.000,00	1106 TAHUN 2025	15 Oktober 2025	SK GUBERNUR	309/NPHD1-KESRA/XI/2025	
			JUMLAH	**71.590.737.400,00**					

LAMPIRAN 3

REKAPITULASI BEBAN DIBAYAR DIMUKA OPD

PER 31 DESEMBER 2025

No	Nama OPD	Saldo Beban Dibayar Dimuka
1	Dinas Pendidikan	79.707.638,89
2	Dinas Kesehatan	13.027.777,78
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.166.666,67
4	Dinas Sosial	59.037.500,00
5	Dinas Perhubungan	8.958.333,33
6	Dinas Pariwisata	22.666.666,67
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	586.198.030,00
8	Biro Umum	415.557.292,65
9	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.472.222,22
10	Badan Keuangan dan Aset Daerah	112.916.666,67
11	Badan Pendapatan Daerah	659.611.462,05
12	Sekretariat DPRD	4.662.000,00
Total		**1.984.982.256,93**

LAMPIRAN 3A

REKAPITULASI BEBAN DIBAYAR DIMUKA
PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2025
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA PPTK / NOMOR HP	KODE REKENING BELANJA	NAMA REKENING BELANJA	NOMOR BUKTI/ KWITANSI DAN TANGGAL	NAMA PENYEDIA, ALAMAT, NOMOR TELEPON	PERIKATAN (SURAT PERJANJIAN SEWA)			RINCIAN SEWA			KUITANSI PENYEDIA			SP2D			BAST BARANG		NILAI SEWA	PPN	PPH	JUMLAH NILAI PENERIMA
							NOMOR	TANGGAL	PERIODE SEWA dan Tgl .. s.d. Tgl...	ITEM	JUMLAH	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL				
1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KIKI DESIKA, SH,M.H.	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan	14/FAKTUR/2/III/2025	AHMAD JL LIMAU KASTURI Rt 002 Rw 003 seri kuala lobam Bintan	1.07.3/SPK/DISDIK/2025	17-Feb-25	17-2-2025 s/d 16-2-2026	LS Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Pengawas Bintan	43.050.000,00	43.050.000,00	14/FAKTUR/2/III/2025	17-Feb-25	43.050.000,00	21.00/04.0/000223/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025	2 Juli 2025	43.050.000,00	1.07.3-6A/DISDIK/BASTP-pl/2025	17-Feb-25	43.050.000,00	8.144.594,00		34.905.406,00
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KIKI DESIKA, SH,M.H.	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan	06/FAKTUR/2/2025	MARDIANA Jl Ir Sutami no 45 Rt 7 Rw 5 TPI	01.07.7/SPK/DISDIK/2025	07-Apr-25	7-4-2025 s/d 6-4-2025	LS Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Arsip Dinas Pendidikan senilai	36.750.000,00	36.750.000,00	06/FAKTUR/2/2025	07-Apr-25	36.750.000,00	21.00/04.0/000246/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025	16 Juli 2025	36.750.000,00	1.07.7.14A/DISDIK/BASTP-PL/2025	07-Apr-25	36.750.000,00	6.952.703,00		29.797.297,00
3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	KIKI DESIKA, SH,M.H.	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan	03/FAKTUR/II/2025	LAURA MARIANI Jl timor no 36 A Bengkong dalamRt 001 Rw 009 Tanjung Buntung Batam	1.07.2/SPK/DISDIK/2025	20-Jan-25	20-1-2025 s/d 19-1-2026	LS Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor ,Sewa Kacabdis dan Pengawas Batam	61.800.000,00	61.800.000,00	03/FAKTUR/II/2025	20-Jan-25	61.800.000,00	21.00/04.0/000245/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025	16 Juli 2025	61.800.000,00	1.07.2.18A/DISDIK/BASTP-PL/2025	20-Jan-25	61.800.000,00	5.567.568,00		56.232.432,00
4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KIKI DESIKA, SH,M.H.	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan	8/FAKTUR/V/2025	H. SUHARDI, S.Pd.SD Jl H. Adam malik Rt 001 Rw 001Kec Bandarsyah Bunguran Timur	1.07.5/SPK/DISDIK/2025	19 Mei 2025	14-2-2025 s/d 13-2-2026	LS Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Kacabdis dan Pengawas Kab. Natuna senilai	48.300.000,00	48.300.000,00	8/FAKTUR/V/2025	14-Feb-25	48.300.000,00	21.00/04.0/000243/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025	16 Juli 2025	48.300.000,00	1.07.05-30A/DISDIK BASTP-pl/2025	14-Feb-25	48.300.000,00	9.137.837,00		39.162.163,00
5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KIKI DESIKA, SH,M.H.	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan	05/FAKTUR/IV/2025	ARDIANSYAH Jl Teluk Air Rt 002 Rw 001 Teluk Air Karimun	1.07.4/SPK/DISDIK/2025	15-Feb-25	15-2-2025 s/d 14-2-2026	LS Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Kacabdis dan Pengawas Karimun	46.200.000,00	46.200.000,00	05/FAKTUR/IV/2025	17-Feb-25	46.200.000,00	21.00/04.0/000244/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025	16 Juli 2025	46.200.000,00	1.07.2-37A/DISDIK/BASTP-PL/2025	17-Feb-25	46.200.000,00	8.741.040,00		37.458.960,00
6	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KIKI DESIKA, SH,M.H.	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan	4/FAKTUR/2/III/2025	SAID USMAN Jl.pemuda gg setia no 7 tpi	01.07.8/SPK/DISDIK/2025	20 Mei 2025	20-5-2025 s/d 19-5-2026	LS Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Arsip	36.750.000,00	36.750.000,00	4/FAKTUR/2/III/2025	22 Mei 2025	36.750.000,00	21.00/04.0/000247/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025	16 Juli 2025	36.500.000,00	07.09.08.26A/DISDIK/BASTP-PL/2025	20 Mei 2025	36.500.000,00	6.905.800,00		29.594.200,00
7	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KIKI DESIKA, SH,M.H.	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan	2/FAKTUR/I/2025	YAMINO Jl sei serai Rt 005 Rw 011 Sejang TPI	1.07.1/SPK/DISDIK 2025	03-Feb-25	3-2-2025 s/d 2-2-2026	LS Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Pengawas SMA/SMK/SLB Kota Tanjungpinang senilai	48.300.000,00	48.300.000,00	2/FAKTUR/I/2025	06-Feb-25	48.300.000,00	21.00/04.0/000224/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025	2 Juli 2025	48.300.000,00	1.07.1A/DISDIK/BASTP-PL/2025	03-Feb-25	48.300.000,00	9.137.837,00		39.162.163,00
8	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	KIKI DESIKA, SH,M.H.	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan	8/FAKTUR/IX/2025	BOON HWAT JL.pelantar serkah Rt 001 Rw 001 tarempak	01.07.9/SPK/DISDIK/2025	30 Mei 2025	30-5-2025 s/d 29-5-2026	LS Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Cabang Dinas Anambas senilai	31.500.000,00	31.500.000,00	8/FAKTUR/IX/2025	3 Juni 2025	31.500.000,00	21.00/04.0/000309/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2025	1 September 2025	31.500.000,00	1.07.7.18A/DISDIK/BASTP-PL/2025	30 Mei 2025	31.500.000,00	5.959.460,00		25.540.540,00
9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KIKI DESIKA, SH,M.H.	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan	06/FAKTUR/11/2025	SY.SILVIA ANDRIYANI,S.Pd.MM Perum cipta emerald blokG no3ARt 004 Rw 036 Berlian Batam	1.07.6/SPK/DISDIK 2025	22 Maret 2025	22-3-2025 s/d 21-3-2025	LS Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Pengawas Lingga	20.000.000,00	20.000.000,00	06/FAKTUR/11/2025	24 Maret 2025	20.000.000,00	21.00/04.0/000377/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/P4/9/2025	23-Sep-25	20.000.000,00	1.07.6.61A/DISDIK BASTP-PL/2025	24Maret 2025	20.000.000,00	3.783.982,00		16.216.018,00
10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KIKI DESIKA, SH,M.H.	5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) - Sewa Mesin Fotocopy - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	No. 055/CB/Faktur 100%/XI/2025	RINNA TESKA NOVIANTY	Surat Pesanan Nomor : EP-01K7NFW4NNEZGCB69RHQ0TZABN	17-Okt-25	17-10-2025 S.D 13-2-2026	LS Belanja Sewa Mesin Fotocopy	46.620.000,00	46.620.000,00	No. 055/CB/Faktur 100%/XI/2025	03-Nov-25	46.620.000,00	21.00/04.0/000528/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	18-Nov-25	46.620.000,00	No. /DISDIK/BA_STP/SP_E-PUR/2025	03-Nov-25	46.620.000,00	4.620.000,00	840.000,00	41.160.000,00
TOTAL																					**419.020.000,00**	**68.950.821,00**	**840.000,00**	**349.229.179,00**

Perhitungan Beban Sewa Dibayar Dimuka							
Nilai sewa	Bulan	Tanggal Beban Sewa dibayar dimuka	Tanggal akhir tahun anggaran 2025	Perhitungan hari	Hari kalender	Beban Sewa Tahun Berjalan	Beban Sewa dibayar dimuka
43.050.000,00	12	17/02/2025	31/12/2025	317	360	37.907.916,67	5.142.083,33
36.750.000,00	12	07/04/2025	31/12/2025	268	360	27.358.333,33	9.391.666,67
61.800.000,00	12	20/01/2025	31/12/2025	345	360	59.225.000,00	2.575.000,00
48.300.000,00	12	14/02/2025	31/12/2025	320	360	42.933.333,33	5.366.666,67
46.200.000,00	12	15/02/2025	31/12/2025	319	360	40.938.333,33	5.261.666,67
36.500.000,00	12	20/05/2025	31/12/2025	225	360	22.812.500,00	13.687.500,00
48.300.000,00	12	03/02/2025	31/12/2025	331	360	44.409.166,67	3.890.833,33
31.500.000,00	12	30/05/2025	31/12/2025	215	360	18.812.500,00	12.687.500,00
20.000.000,00	12	22/03/2025	31/12/2025	284	360	15.777.777,78	4.222.222,22
46.620.000,00	4	17/10/2025	31/12/2025	75	120	29.137.500,00	17.482.500,00
419.020.000,00						**339.312.361,11**	**79.707.638,89**

LAMPIRAN 3B

REKAPITULASI BEBAN DIBAYAR DIMUKA
PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2025
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA PPTK / NOMOR HP	KODE REKENING BELANJA	NAMA REKENING BELANJA	NOMOR BUKTI/ KWITANSI DAN TANGGAL	NAMA PENYEDIA, ALAMAT, NOMOR TELEPON	PERIKATAN (SURAT PERJANJIAN			RINCIAN SEWA			KUITANSI PENYEDIA			SP2D			BAST BARANG		NILAI SEWA	PPN	PPH	JUMLAH NILAI PENERIMA
							NOMOR	TANGGAL	PERIODE SEWA dan Tgl .. s.d. Tgl...	ITEM	JUMLAH	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL				
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Iffah Lathifah, A.Md.Farm, S.I.Kom	5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		Drs. Syafri Salisman, Jl. Siderejo Komp. Perum Puri Mulia Residen B RT. 001/ RW.002, Kelurahan Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang	No. 044/SPK-YANKES.DINKES/III/2025	13 MARET 2025	13 MARET 2025 s.d 12 MARET 2026	Rumah Toko (RUKO)	2	70,000,000	NO. 01. FAK-RUKO/XI/2025	25-Nov-25	70.000.000,00	21.00/04.0/000558/TU/1.02.0.00.0.00.02.0000/PR/11/2025	21-Nov-25	150.000.000,00	602/BASTB-YANKES.DINKES/XI/2025	25-Nov-25	70.000.000,00	6.936.937,00	6.306.306,00	56.756.757,00
TOTAL																					**70.000.000,00**	**6.936.937,00**	**6.306.306,00**	**56.756.757,00**

Perhitungan Beban Sewa Dibayar Dimuka							
Nilai sewa	Bulan	Tanggal Beban Sewa dibayar dimuka	Tanggal akhir tahun anggaran 2025	Perhitungan hari	Hari kalender	Beban Sewa Tahun Berjalan	Beban Sewa dibayar dimuka
70.000.000,00	12	13/03/2025	31/12/2025	293	360	56.972.222,22	13.027.777,78
70.000.000,00						**56.972.222,22**	**13.027.777,78**

LAMPIRAN 3C

REKAPITULASI BEBAN DIBAYAR DIMUKA
PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA PPTK / NOMOR HP	KODE REKENING BELANJA	NAMA REKENING BELANJA	NOMOR BUKTI/ KWITANSI DAN TANGGAL	NAMA PENYEDIA, ALAMAT, NOMOR TELEPON	PERIKATAN (SURAT PERJANJIAN SEWA)			RINCIAN SEWA			KUITANSI PENYEDIA			SP2D			BAST BARANG		NILAI SEWA	PPN	PPH	JUMLAH NILAI PENERIMA
							NOMOR	TANGGAL	PERIODE SEWA dan Tgl .. s.d. Tgl...	ITEM	JUMLAH	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL				
1	Pengadaan Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya	Benito Masnura, S.S	5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	11.5/PAPBY-SG/APBD/BPBD.SET.03/2025	LINDA	01/SPK/PPK.SEWA GEDUNG/BPBD.SET.03/2025	17 Februari 2025	20 Februari 2025 s.d 20 Februari 2026	2 Unit	75.000.000,00	150.000.000,00	01/SEWA GUDANG//II/2025	20 Februari 2025	150.000.000,00	21.00/04.0/000013/LS/1.05.0.00.0.00.04.0000/P1/3/2025	27 Maret 2025	150.000.000,00	11.1/BAPPBJ-SG/BPBD.SET.03/II/2025	20 Februari 2025	150.000.000,00		15.000.000,00	135.000.000,00
TOTAL																					150,000,000.00	-	15,000,000.00	135,000,000.00

Perhitungan Beban Sewa Dibayar Dimuka							
Nilai sewa	Bulan	Tanggal Beban Sewa dibayar dimuka	Tanggal akhir tahun anggaran 2025	Perhitungan hari	Hari kalender	Beban Sewa Tahun Berjalan	Beban Sewa dibayar dimuka
150.000.000,00	12	20/02/2025	31/12/2025	314	360	130.833.333,33	19.166.666,67
150.000.000,00						**130.833.333,33**	**19.166.666,67**

LAMPIRAN 3D

REKAPITULASI BEBAN DIBAYAR DIMUKA
PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2025
DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA PPTK / NOMOR HP	KODE REKENING BELANJA	NAMA REKENING BELANJA	NOMOR BUKTI/ KWITANSI DAN TANGGAL	NAMA PENYEDIA, ALAMAT, NOMOR TELEPON	PERIKATAN (SURAT PERJANJIAN SEWA)			RINCIAN SEWA			KUITANSI PENYEDIA			SP2D			BAST BARANG		NILAI SEWA	PPN	PPH	JUMLAH NILAI PENERIMA
							NOMOR	TANGGAL	PERIODE SEWA dan Tgl .. s.d. Tgl...	ITEM	JUMLAH	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL				
1	Penyediaan Permakanan (Bencana)	FATIHATULLAH, SE, MM	5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang		TRISNAWATI, Barek Motor RT 002, RT 008 Kijang Kota	1.06.06.1.01.01/01/DINSOS/2/SPn/2025	15 Agustus 2025	15 Agustus 2025 - 14 Agustus 2026	RUKO	2 UNIT	75.000.000,00			75.000.000,00	21.00/04.0/000108/LS/1.06.0.00.0.00.06.0000/P4/9/2025	25-Sep-25	75.000.000,00	1.06.06.1.01.01/01/DINSOS/2/BAST/2025	15 Agustus 2025	75.000.000,00	8.250.000,00	6.675.000,00	60.075.000,00
2	Penyediaan Asrama Yang Mudah di Akses	REAN APRILIANA, SE	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor		A ING, Jl.Brigjen Katamso No. 101	1.06.04.1.02.04/01/DINSOS/2/SPn/2025	08-Apr-25	8 April 2025 - 07 April 2026	RUKO	1 UNIT	49.500.000,00			49.500.000,00	21.00/04.0/000060/LS/1.06.0.00.0.00.06.0000/P3/6/2025	12 Juni 2025	49.500.000,00	1.06.04.1.02.04/01/DINSOS/2/BAST/2025	08-Apr-25	49.500.000,00	4.905.405,00	4.459.459,00	40.135.136,00
TOTAL																					124.500.000,00	13.155.405,00	11.134.459,00	100.210.136,00

Perhitungan Beban Sewa Dibayar Dimuka							
Nilai sewa	Bulan	Tanggal Beban Sewa dibayar dimuka	Tanggal akhir tahun anggaran 2025	Perhitungan hari	Hari kalender	Beban Sewa Tahun Berjalan	Beban Sewa dibayar dimuka
75.000.000,00	12	15/08/2025	31/12/2025	138	360	28.750.000,00	46.250.000,00
49.500.000,00	12	08/04/2025	31/12/2025	267	360	36.712.500,00	12.787.500,00
124.500.000,00						**65.462.500,00**	**59.037.500,00**

LAMPIRAN 3E

REKAPITULASI BEBAN DIBAYAR DIMUKA
PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2025
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA PPTK / NOMOR HP	KODE REKENING BELANJA	NAMA REKENING BELANJA	NOMOR BUKTI/ KWITANSI DAN TANGGAL	NAMA PENYEDIA, ALAMAT, NOMOR TELEPON	PERIKATAN (SURAT PERJANJIAN			RINCIAN SEWA			KUITANSI PENYEDIA			SP2D			BAST BARANG		NILAI SEWA	PPN	PPH	JUMLAH NILAI PENERIMA
							NOMOR	TANGGAL	PERIODE SEWA dan Tgl .. s.d. Tgl...	ITEM	JUMLAH	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL				
1	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah / pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	MUHAMAD REZA, S.E., M.H / 0811777601	5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	21.00/03.0/00007/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 / 18 FEBRUARI 2025	PIETER	06/SP/SGK-E-TPI/HUB/II/2025	17/02/2025	17 FEBRUARI 2025 SD 16 FEBRUARI 2026	SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	75.000.000,00	02/SEWA/II/2025	18/02/2025	75.000.000,00	21.00/04.0/000009/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025	18/02/2025	75.000.000,00	06/BASTP/SGK-E-TPI/HUB/II/2025	17 FEBRUARI 2025	75.000.000,00	7.432.432,00	6.756.757,00	60.810.811,00
TOTAL																					75.000.000,00	7.432.432,00	6.756.757,00	60.810.811,00

Perhitungan Beban Sewa Dibayar Dimuka							
Nilai sewa	Bulan	Tanggal Beban Sewa dibayar dimuka	Tanggal akhir tahun anggaran 2025	Perhitungan hari	Hari kalender	Beban Sewa Tahun Berjalan	Beban Sewa dibayar dimuka
75.000.000,00	12	17/02/2025	31/12/2025	317	360	66.041.666,67	8.958.333,33
75.000.000,00						**66.041.666,67**	**8.958.333,33**

LAMPIRAN 3F

REKAPITULASI BEBAN DIBAYAR DIMUKA
PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2025
DINAS PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA PPTK / NOMOR HP	KODE REKENING BELANJA	NAMA REKENING BELANJA	NOMOR BUKTI/ KWITANSI DAN TANGGAL	NAMA PENYEDIA, ALAMAT, NOMOR TELEPON	PERIKATAN (SURAT PERJANJIAN SEWA)			RINCIAN SEWA			KUITANSI PENYEDIA			SP2D			BAST BARANG		NILAI SEWA	PPN	PPH	JUMLAH NILAI PENERIMA
							NOMOR	TANGGAL	PERIODE SEWA dan Tgl .. s.d. Tgl...	ITEM	JUMLAH	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL				
1	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUIB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	HARSIH, SE Par/ 081364603025	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	21.00/04.0/000056/LS/3.26.0.00.0.00.0.1.0000/P1/8/205 Tanggal 11 Agustus 2025	ARI DANIEL PASARIBU KOMP. GRAND CALIFORNIA BLOK B2 NO. 10 TAMAN BALAOI BATAM KOTA	55454079	21/05/2025	21/05/2025 s/d 20/05/2026	RUKO	1 UNIT	60.000.000	01/INVOICE-SEWA/GMP/V/2025 TANGGAL 26 MEI 2025	03-Jan-23	60.000.000	21.00/04.0/000056/LS/3.26.0.00.0.00.01.0000/P4/8/2025	08-Nov-25	60.000.000	146.1/BA-SERAH/DISPAR/V/2025	21/05/2025	60.000.000		6.000.000	54.000.000
TOTAL																					60.000.000		6.000.000	54.000.000

Perhitungan Beban Sewa Dibayar Dimuka							
Nilai sewa	Bulan	Tanggal Beban Sewa dibayar dimuka	Tanggal akhir tahun anggaran 2025	Perhitungan hari	Hari kalender	Beban Sewa Tahun Berjalan	Beban Sewa dibayar dimuka
60.000.000,00	12	21/05/2025	31/12/2025	224	360	37.333.333,33	22.666.666,67
60.000.000,00						**37.333.333,33**	**22.666.666,67**

LAMPIRAN 3G

REKAPITULASI BEBAN DIBAYAR DIMUKA
PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2025
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA PPTK / NOMOR HP	KODE REKENING BELANJA	NAMA REKENING BELANJA	NOMOR BUKTI/ KWITANSI DAN TANGGAL	NAMA PENYEDIA, ALAMAT, NOMOR TELEPON	PERIKATAN (SURAT PERJANJIAN			RINCIAN SEWA			KUITANSI PENYEDIA			SPM			SP2D			BAST BARANG		NILAI SEWA	PPN	PPH	JUMLAH NILAI PENERIMA
							NOMOR	TANGGAL	PERIODE SEWA dan Tgl .. s.d. Tgl...	ITEM	JUMLAH	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL				
1	Fasilitasi Pengembangaan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Suhepny, SE	5.102.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	01/Inv.PEKANBARUPUTRI/II/2025, 13 Februari 2025	Meritus Fitriani	019/SPK/PPK-B.KR/4.01.04.04.1.02.0001/II/2025	10 Februari 2025	13 Februari 2025 s/d 12 Februari 2026	rumah bulatan lengkap	1 unit	64.602.000,00	01/Inv.PEKANBARUPUTRI/II/2025,	13 Februari 2025	64.602.000,00	21.00/03.0/000331/LS/4.01.0.0.0.00.22.0000/P3/4/2025	4/22/2025	64.602.000,00	21.00/04.0/000254/LS/4.01.0.0.0.00.22.0000/P3/5/2025	22 Mei 2025	64.602.000,00	019/BA-ST/B.KR/4.01.04.1.02.0001/II/2025	13 Februari 2025	64.602.000,00	6.402.000,00	5.820.000,00	52.380.000,00
2	Fasilitasi Pengembangaan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Suhepny, SE	5.102.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	02/INV-SBY,PUTRI/V/2025. 5 Mei 2025	Siti Rohmiati/ 081357733830	059/SPK/PPK-B.KR/4.01.04.1.02.0001/V/2025	5 Mei 2025	5 Mei 2025 s/d 4 Mei 2026	rumah bulatan lengkap	1 unit	60.606.000,00	02/INV-SBY,PUTRI/V/2025	5 Mei 2025	60.606.000,00	21.00/03.0/000479/LS/4.010.00.00.22.0000/P3/5/2025	22 Mei 2025	60.606.000,00	21.00/04.0/000327/LS/4.01.0.0.0.00.22.0000/P3/6/2025	4 Juni 2025	60.606.000,00	059/BA-sT/B.KR/4.01.04.1.02.0001/V/2025	5 Mei 2025	60.606.000,00	6.006.000,00	5.460.000,00	49.140.000,00
3	Fasilitasi Pengembangaan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Suhepny, SE	5.102.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	04/MALANG-PUTRA/VI/2025, 3 Juni 2025	Aprilia Anggraeni	064/SPK/PPK-B.KR/4.01.04.1.02.0001/VI/2025	3 Juni 2025	3 Juni 2025 s/d 2 Juni 2026	rumah bulatan lengkap	1 unit	54.945.000,00	04/MALANG-PUTRA/VI/2025	3 Juni 2025	54.945.000,00	21.00/03.0/000547/LS/4.010.00.00.22.0000/P3/6/2025	20 Juni 2025	54.945.000,00	21.00/04.0/000457/LS/4.01.0.0.0.00.22.0000/P4/7/2025	17 Juli 2025	54.945.000,00	064/BA-ST/b.KR/4.01.04.1.02.0001/VI/2025	3 Juni 2025	54.945.000,00	5.445.000,00	4.950.000,00	44.550.000,00
4	Fasilitasi Pengembangaan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Suhepny, SE	5.102.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	03/MALANG-PUTRI/VI/2025, 5 Juni 2025	Mutmainah Amini	061/SPK/PPK-B.KR/4.01.04.1.02.0001/VI/2025	5 Juni 2025	5 Juni 2025 s/d 4 Juni 2026	rumah bulatan lengkap	1 unit	62.097.840,00	03/MALANG-PUTRI/VI/2025	5 Juni 2025	62.097.840,00	21.00/3.0/549/LS/4.01.0.00.22.0000/P3/6/2025	20 Juni 2025	62.097.840,00	21.00/04.0/000456/LS/4.01.0.0.0.00.22.0000/P4/7/2025	17 Juli 2025	62.097.840,00	061/BA-ST/B.KR/4.01.04.1.02.01/VI/2025	5 Juni 2025	62.097.840,00	6.153.840,00	5.594.000,00	50.350.000,00
5	Fasilitasi Pengembangaan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Suhepny, SE	5.102.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	05/Medan-putra/VI/2025, 2 Juni 2025	Samiah BR Ginting	071/SPK/PPK-B.KR/4.01.04.04.1.02.0001/V/2025	28 Mei 2025	2 Juni 2025 s/d 2 Juni 2026	rumah bulatan lengkap	1 unit	54.212.400,00	05/Medan-putra/VI/2025,	2 Juni 2025	54.212.400,00	21.00/03.0/000661/LS/4.010.00.00.22.0000/P4/7/2025	24 Juli 2025	54.212.400,00	21.00/04.0/000505/LS/4.01.0.0.0.00.22.0000/P4/7/2025	30 Juli 2025	54.212.400,00	094/BA-ST/B.KR/4.01.04.1.02.0001/VI/2025	28 Juni 2025	54.212.400,00	5.372.400,00	4.884.000,00	43.956.000,00
6	Fasilitasi Pengembangaan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Suhepny, SE	5.102.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	06/PADANG-PUTRA/VI/2025 28 Juni 2025	Yosrida Risman	094/SPK/PPK-B.KR/4.01.04.04.1.02.0001/VI/2025	26 Juni 2025	28 Juni 2025 s/d 27 Juni 2026	rumah bulatan lengkap	1 unit	59.567.040,00	06/PADANG-PUTRA/VI/2025	28 Juni 2025	59.567.040,00	21.00/03.0/000685/LS/4.010.00.00.22.0000/P4/8/2025	05/08/2025	59.567.040,00	21.00/04.0/000563/LS/4.01.0.0.0.00.22.0000/P4/8/2025	21 Agustus 2025	59.567.040,00	094/BA-ST/B.KR/4.01.04.1.02.0001/VI/2025	28 Juni 2025	59.567.040,00	5.903.040,00	5.366.400,00	48.297.600,00
7	Fasilitasi Pengembangaan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Suhepny, SE	5.102.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	07/PADANG-PUTRI/VII/2025, 4 JUli 2025	Astrid Budiman	100/SPK/PPK-B.KR/4.01.04.04.1.02.0001/VII/2025	4 Juli 2025	4 Juli 2025 s/d 3 Juli 2026	rumah bulatan lengkap	1 unit	59.567.040,00	07/PADANG-PUTRI/VII/2025,	4 Juli 2025	59.567.040,00	21.00/03.0/000889LS/4.010.00.00.22.0000/P4/10/2025	06 Oktober 2025	59.567.040,00	21.00/04.0/000720/LS/4.01.0.0.0.00.22.0000/PR/10/2025	21 Oktober 2025	59.567.040,00	100/BA-ST/B.KR/4.01.04.1.02.0001/VI/2025	4 Juli 2025	59.567.040,00	5.903.040,00	5.366.400,00	48.297.600,00
8	Fasilitasi Pengembangaan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Suhepny, SE	5.102.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	08/PONTIANAK-PUTRA/VIII/2025, 1 Agustus 2025	Safriadi, S.T	109/SPK/PPK-B.KR/4.01.04.04.1.02.0001/VII/2025	31 Juli 2025	2 Agustus 2025 s/d 1 Agustus 2026	rumah bulatan lengkap	1 unit	79.920.000,00	08/PONTIANAK PUTRA/VIII/2025	1 Agustus 2025	79.920.000,00	21.00/03.0/000736/LS/4.010.00.00.22.0000/P4/10/2025	22 Agustus 2025	79.920.000,00	21.00/04.0/000598/LS/4.01.0.0.0.00.22.0000/P4/9/2025	02-Sep-25	79.920.000,00	109/BA-ST/B.KR/4.01.04.1.02.0001/VIII/2025	1 Agutsus	79.920.000,00	7.920.000,00	7.200.000,00	64.800.000,00
9	Fasilitasi Pengembangaan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Suhepny, SE	5.102.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	09/PONTIANAK-PUTRI/VIII/2025, 1 Agustus 2025	Safriadi, S.T	110/SPK/PPK-B.KR/4.01.04.04.1.02.0001/VII/2025	31 Juli 2025	2 Agustus 2025 s/d 1 Agustus 2026	rumah bulatan lengkap	1 unit	79.920.000,00	09/PONTIANAK PUTRI/VIII/2025	1 Agustus 2025	79.920.000,00	21.00/03.0/000767/LS/4.010.00.00.22.0000/P4/10/2025	22 Agustus 2025	79.920.000,00	21.00/04.0/000599/LS/4.01.0.0.0.00.22.0000/P4/9/2025	02-Sep-25	79.920.000,00	110/BA-ST/B.KR/4.01.04.1.02.0001/VIII/2025	1 Agutsus	79.920.000,00	7.920.000,00	7.200.000,00	64.800.000,00
10	Fasilitasi Pengembangaan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Suhepny, SE	5.102.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	11/JOMBANG-PUTRA/VIII/2025, 18 Agustus 2025	Saiful Ma'arif	113/SPK/PPK-B.KR/4.01.04.04.1.02.0001/VII/2025	14 Agustus 2025	18 Agustus 2025 s/d 17 Agustus 2026	rumah bulatan lengkap	1 unit	52.614.000,00	10/JOMBANG-PUTRA/VIII/2025,	14 Agustus 2025	52.614.000,00	21.00/03.0/000780/LS/4.010.00.00.22.0000/P4/10/2025	01-Sep-25	52.614.000,00	21.00/04.0/000606/LS/4.01.0.0.0.00.22.0000/P4/9/2025	09-Sep-25	52.614.000,00	113/BA-ST/B.KR/4.01.04.1.02.0001/VIII/2025	18 Agustus 2025	52.614.000,00	5.214.000,00	4.740.000,00	42.660.000,00
11	Fasilitasi Pengembangaan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Suhepny, SE	5.102.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	11/JOMBANG-PUTRI/VIII/2025, 18 Agustus 2025	Biah	114/SPK/PPK-B.KR/4.01.04.04.1.02.0001/VII/2025	18 Agustus 2025	18 Agustus 2025 s/d 17 Agustus 2026	rumah bulatan lengkap	1 unit	42.024.600,00	11/JOMBANG-PUTRI/VIII/2025,	18 Agustus 2025	42.024.600,00	21.00/03.0/000782/LS/4.010.00.00.22.0000/P4/10/2025	01-Sep-25	42.024.600,00	21.00/04.0/000607/LS/4.01.0.0.0.00.22.0000/P4/9/2025	09-Sep-25	42.024.600,00	114/BA-ST/B.KR/4.01.04.1.02.0001/VIII/2025	18 Agustus 2025	42.024.600,00	4.164.600,00	3.786.000,00	34.074.000,00

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA PPTK / NOMOR HP	KODE REKENING BELANJA	NAMA REKENING BELANJA	NOMOR BUKTI/ KWITANSI DAN TANGGAL	NAMA PENYEDIA, ALAMAT, NOMOR TELEPON	PERIKATAN (SURAT PERJANJIAN			RINCIAN SEWA			KUITANSI PENYEDIA			SPM			SP2D			BAST BARANG		NILAI SEWA	PPN	PPH	JUMLAH NILAI PENERIMA
							NOMOR	TANGGAL	PERIODE SEWA dan Tgl .. s.d. Tgl...	ITEM	JUMLAH	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL				
12	Fasilitasi Pengembangaan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Suhepny, SE	5.102.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	13/SEMARANG-PUTRA/XI/2025, 18 November 2025	Nur Chamy Hidayati	153/SPK/PPK-B.KR/4.01.04.04.1.02.0001/XI/2025	14-Nov-25	18 November 2025 s/d 17 November 2026	rumah bulatan lengkap	1 unit	67.532.400,00	13/SEMARANG-PUTRA/XI/2025	18-Nov-25	67.532.400,00	21.00/03.0/0001146/LS/4.010.00.0.00.22.0000/PPR2/12/2025	02 Desember 2025	67.532.400,00	21.00/04.0/000951/LS/4.01.0.00.0.00.22.0000/PPR3/12/2025	09-Des-25	67.532.400,00	153/BA-ST/B.KR/4.01.04.1.02.0001/XI/2025	18-Nov-25	67.532.400,00	6.692.400,00	6.084.000,00	54.756.000,00
13	Fasilitasi Pengembangaan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Suhepny, SE	5.102.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	13/SEMARANG-PUTRI/XI/2025, 18 November 2025	Chodriyah	154/SPK/PPK-B.KR/4.01.04.04.1.02.0001/XI/2025	14-Nov-26	18 November 2025 s/d 17 November 2026	rumah bulatan lengkap	1 unit	59.540.400,00	13/SEMARANG-PUTRI/XI/2025	18-Nov-25	59.540.400,00	21.00/03.0/0001028/LS/4.010.00.0.00.22.0000/PPR2/12/2025	17-Nov-25	59.540.400,00	21.00/04.0/000815/LS/4.01.0.00.0.00.22.0000/PR/11/2025	24-Nov-25	59.540.400,00	154/BA-ST/B.KR/4.01.04.1.02.0001/XI/2025	18-Nov-25	59.540.400,00	5.900.400,00	5.364.000,00	48.276.000,00
14	Fasilitasi Pengembangaan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Suhepny, SE	5.102.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	12/SURABAYA-PUTRA/XI/2025, 18 November 2025	Saptoniyoto Adi	152/SPK/PPK-B.KR/4.01.04.04.1.02.0001/XI/2025	14-Nov-25	18 November 2025 s/d 17 November 2026	rumah bulatan lengkap	1 unit	73.260.000,00	13/SEMARANG-PUTRIAXI/2025, 18 November 2025	18-Nov-25	73.260.000,00	21.00/03.0/0001011/LS/4.010.00.0.00.22.0000/PR/11/2025	17-Nov-25	73.260.000,00	21.00/04.0/000816/LS/4.01.0.00.0.00.22.0000/PR/11/2025	24-Nov-25	73.260.000,00	152/BA-ST/B.KR/4.01.04.1.02.0001/XI/2025	18-Nov-25	73.260.000,00	7.260.000,00	6.600.000,00	59.400.000,00
15	Fasilitasi Pengembangaan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Suhepny, SE	5.102.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	15/YOGYAKARTA PUTRI/XI/2025, 25 November 2025	Widodo SP	155/SPK/PPK-B.KR/4.01.04.04.1.02.0001/XI/2025	20-Nov-25	25 November s/d 24 November 2026	rumah bulatan lengkap	1 unit	59.274.000,00	15/YOGYAKARTA PUTRI/XI/2025	25-Nov-25	59.274.000,00	21.00/03.0/0001008/LS/4.010.00.0.00.22.0000/PPR2/12/2025	17-Nov-25	59.274.000,00	21.00/04.0/000813/LS/4.01.0.00.0.00.22.0000/PR/11/2025	24-Nov-25	59.274.000,00	155/BA-ST/B.KR/4.01.04.1.02.0001/XI/2025	25-Nov-25	59.274.000,00	5.900.000,00	5.364.000,00	48.010.000,00
16	Fasilitasi Pengembangaan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar/Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Suhepny, SE	5.102.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	16/SURAKARTA-PUTRI/XI/2025, 25 November 2025	Bukimin	156/SPK/PPK-B.KR/4.01.04.04.1.02.0001/XI/2025	24-Nov-25	25 November s/d 24 November 2026	rumah bulatan lengkap	1 unit	52.947.000,00	16/SURAKARTA-PUTRI/XI/2025	25-Nov-25	52.947.000,00	21.00/03.0/0001009/LS/4.010.00.0.00.22.0000/PR2/11/2025	17-Nov-25	52.947.000,00	21.00/04.0/000814/LS/4.01.0.00.0.00.22.0000/PR/11/2025	25-Nov-25	52.947.000,00	155/BA-ST/B.KR/4.01.04.1.02.0001/XI/2025	17-Nov-25	52.947.000,00	5.247.000,00	4.770.000,00	42.930.000,00
TOTAL																								982.629.720,00	97.403.720,00	88.548.800,00	796.677.200,00

Perhitungan Beban Sewa Dibayar Dimuka							
Nilai sewa	Bulan	Tanggal Beban Sewa dibayar dimuka	Tanggal akhir tahun anggaran 2025	Perhitungan hari	Hari kalender	Beban Sewa Tahun Berjalan	Beban Sewa dibayar dimuka
64.602.000,00	12	13/02/2025	31/12/2025	321	360	57.603.450,00	6.998.550,00
60.606.000,00	12	05/05/2025	31/12/2025	240	360	40.404.000,00	20.202.000,00
54.945.000,00	12	03/06/2025	31/12/2025	211	360	32.203.875,00	22.741.125,00
62.097.840,00	12	05/06/2025	31/12/2025	209	360	36.051.246,00	26.046.594,00
54.212.400,00	12	02/06/2025	31/12/2025	212	360	31.925.080,00	22.287.320,00
59.567.040,00	12	28/06/2025	31/12/2025	186	360	30.776.304,00	28.790.736,00
59.567.040,00	12	04/07/2025	31/12/2025	180	360	29.783.520,00	29.783.520,00
79.920.000,00	12	02/08/2025	31/12/2025	151	360	33.522.000,00	46.398.000,00
79.920.000,00	12	02/08/2025	31/12/2025	151	360	33.522.000,00	46.398.000,00
52.614.000,00	12	18/08/2025	31/12/2025	135	360	19.730.250,00	32.883.750,00
42.024.600,00	12	18/08/2025	31/12/2025	135	360	15.759.225,00	26.265.375,00
67.532.400,00	12	18/11/2025	31/12/2025	43	360	8.066.370,00	59.466.030,00
59.540.400,00	12	18/11/2025	31/12/2025	43	360	7.111.770,00	52.428.630,00
73.260.000,00	12	18/11/2025	31/12/2025	43	360	8.750.500,00	64.509.500,00
59.274.000,00	12	25/11/2025	31/12/2025	36	360	5.927.400,00	53.346.600,00
52.947.000,00	12	25/11/2025	31/12/2025	36	360	5.294.700,00	47.652.300,00
982.629.720,00						**396.431.690,00**	**586.198.030,00**

LAMPIRAN 3H

REKAPITULASI BEBAN DIBAYAR DIMUKA
PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2025
BIRO UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA PPTK / NOMOR HP	KODE REKENING BELANJA	NAMA REKENING BELANJA	NOMOR BUKTI/ KWITANSI DAN TANGGAL	NAMA PENYEDIA, ALAMAT, NOMOR TELEPON	PERIKATAN (SURAT PERJANJIAN SEWA)			RINCIAN SEWA			KUITANSI PENYEDIA			SP2D			BAST BARANG		NILAI SEWA	PPN	PPH	JUMLAH NILAI PENERIMA
							NOMOR	TANGGAL	PERIODE SEWA dan Tgl .. s.d. Tgl...	ITEM	JUMLAH	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL				
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	JUNIARTO, SE., MM / 0811696854	5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	B/ 000.1.4 /390/SPK/B.UM/2025 tanggal 19 Juni 2025	SURIANTO / Jl. Brigjen Katamso No. 01 D/C - Tanjungpinang / 08127078850	B/ 000.1.4 /390/SPK/B.UM/2025	19-Jun-25	20 Juni 2025 s.d 20 Juni 2026	Sewa Gudang	1	102.000.000,00	20/Sewa-Gdg/VI/2025	20-Jun-25	102.000.000,00	21.00/04.0/000502/LS/4.01.0.00.0.00.22.0000/P4/7/2025	29-Jul-25	102.000.000,00	B/ 000.1.4 /631/BAST/B.UM/2025	20-Jun-25	102.000.000,00	10.108.108,00	9.189.189,00	82.702.703,00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SENTOT FAISAL,S.IP,M.M M / 085272308883	5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	B/ 000.1.4 /100/SPK/B.UM/2025 tanggal 24 April 2025	LINUS GUSDAR / Komplek Batam Plaza Blok. E/7 Batu Ampar - Batam	B/ 000.1.4 /100/SPK/B.UM/2025	24-Apr-25	24 April 2025 s.d 24 April 2026	Sewa Gudang	1	148.000.000,00	01/Sewa-Gdg/IV/2025	24-Apr-25	148.000.000,00	21.00/04.0/000340/LS/4.01.0.00.0.00.22.0000/P3/6/2025	10-Jun-25	133.200.000,00	B/ 000.1.4 /100/BAST/B.UM/2025	24-Apr-25	148.000.000,00	0,00	14.800.000,00	133.200.000,00
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	TRIA LIBRIYANTI, SE, MM / 08116911155	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	B / 024 / 02 / 12.01 / SP.E / B.UM / 2025 tanggal 15 Januari 2025	CV. AZR BINTAN BERTUAH / Jl. Taman Bahagia No.07, Kel. Kamboja, Kec. Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang	B / 024 / 02 / 12.01 / SP.E / B.UM / 2025	15-Jan-25	15 Januari 2025 s.d 15 Januari 2026	Sewa Mobil	2	151.200.000,00	15/INV/CV.AZR/I/2025	15-Jan-25	151.200.000,00	21.00/04.0/000095/LS/4.01.0.00.0.00.22.0000/P1/3/2025	19-Mar-25	133.491.892,00	B / 024 / 02 / 12.01 / BAST / B.UM / 2025	15-Jan-25	151.200.000,00	14.983.784,00	2.724.324,00	133.491.892,00
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SENTOT FAISAL,S.IP,M.M M / 085272308883	5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	007/08.0004/BUKTI-LS/UMUM/II/2025	MISBARDI / Jl. Kuantan Gg. Putri Ledang 13 No.84 Tpi Timur / 08117701968	B/011/007/08.0004/SPn/II/2025	22-Feb-25	22 Februari 2025 s.d 22 Februari 2026	Sewa Ruko	1	50.000.000,00	01/PP/II/2025	22-Feb-25	50.000.000,00	21.00/04.0/000090/LS/4.01.0.00.0.00.22.0000/P1/3/2025	19-Mar-25	50.000.000,00	B/011/007/08.0004/BAST/II/2025	22-Feb-25	50.000.000,00	4.954.955,00	4.504.505,00	40.540.540,00
5	Pengamanan Barang Milik Daerah	NICO SYISNOVLI RIYADI, S.H., M.M / 082169615753	5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	B/ 000.2.3.2 /235/SPK/B.UM/2025 tanggal 24 November 2025	PT. JASARAHARJA PUTERA/ Jl. Raden Patah Kompleks Libra Center Blok A, No. 4, Lubuk Baja Kota Batam / 081268801385	B/ 000.2.3.2 /235/SPK/B.UM/2025	04-Des-25	21 Desember 2025 s.d 20 Desember 2026	Asuransi Kendaraan Laut (Kapal Kepri 4 dan Kepri 1	2	131.145.650,00	000003/DN/2500/12/25	4 Desember 2025	131.145.650,00	21.00/04.0/000981/LS/4.01.0.00.0.00.22.0000/PPR3/12/2025	19-Des-25	131.145.650,00	B/ 000.2.3.2 /258/BAST/B.UM/2025	04-Des-25	131.145.650,00	0,00	0,00	131.145.650,00
6	Pengamanan Barang Milik Daerah	NICO SYISNOVLI RIYADI, S.H., M.M / 082169615753	5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	B/ 000.2.3.2 /199/SPK/B.UM/2025 tanggal 14 November 2025	PT. ASURANSI BINA DANA ARTA, TBK/ Jl. Sultan Abdulrahman, Kompleks Junayah Plaza Blok A No.3, Lubuk Baja Kota Batam / 082171263999	B/ 000.2.3.2 /199/SPK/B.UM/2025	14-Nov-25	2 Desember 2025 s.d 1 Desember 2026	Asuransi Kendaraan Darat	1	106.666.755,00	J01500/DN/022/11/25	20-Nov-25	106.666.755,00	21.00/04.0/000871/LS/4.01.0.00.0.00.22.0000/PPR2/12/2025	02-Des-25	106.666.755,00	B/ 000.2.3.2 /221/BAST/B.UM/2025	20-Nov-25	106.666.755,00	0,00	0,00	106.666.755,00
7	Pengamanan Barang Milik Daerah	NICO SYISNOVLI RIYADI, S.H., M.M / 082169615753	5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	B/ 000.2.3.2 /197/SPK/B.UM/2025 tanggal 14 November 2025	PT. ASURANSI BOSOWA PERISKOP/ Menara Global Lt. 2 Jalan Jend Gatot Subroto Kav. 27 / 085274001152	B/ 000.2.3.2 /197/SPK/B.UM/2025	14-Nov-25	10 Desember 2025 s.d 9 Desember 2026	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah (Asuransi Bangunan)	1	99.252.000,00	000005/DN/22/11/25	20-Nov-25	99.252.000,00	21.00/04.0/000846/LS/4.01.0.00.0.00.22.0000/PPR1/11/2025	26-Nov-25	99.252.000,00	B/ 000.2.3.2 /220/BAST/B.UM/2025	20-Nov-25	99.252.000,00	0,00	0,00	99.252.000,00
TOTAL																					788.264.405,00	30.046.847,00	31.218.018,00	726.999.540,00

Perhitungan Beban Sewa Dibayar Dimuka

Nilai sewa	Bulan	Tanggal Beban Sewa dibayar dimuka	Tanggal akhir tahun anggaran 2025	Perhitungan hari	Hari kalender	Beban Sewa Tahun Berjalan	Beban Sewa dibayar dimuka
102.000.000,00	12	20/06/2025	31/12/2025	194	360	54.966.666,67	47.033.333,33
148.000.000,00	12	24/04/2025	31/12/2025	251	360	103.188.888,89	44.811.111,11
151.200.000,00	12	15/01/2025	31/12/2025	350	360	147.000.000,00	4.200.000,00
50.000.000,00	12	22/02/2025	31/12/2025	312	360	43.333.333,33	6.666.666,67
131.145.650,00	12	04/12/2025	31/12/2025	27	360	9.835.923,75	121.309.726,25
106.666.755,00	12	02/12/2025	31/12/2025	29	360	8.592.599,71	98.074.155,29
99.252.000,00	12	10/12/2025	31/12/2025	21	360	5.789.700,00	93.462.300,00
788.264.405,00						**372.707.112,35**	**415.557.292,65**

LAMPIRAN 3I

REKAPITULASI BEBAN SEWA DIBAYAR DIMUKA
PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA PPTK / NOMOR HP	KODE REKENING BELANJA	NAMA REKENING BELANJA	NOMOR BUKTI/ KWITANSI DAN TANGGAL	NAMA PENYEDIA, ALAMAT, NOMOR TELEPON	PERIKATAN (SURAT PERJANJIAN			RINCIAN SEWA			KUITANSI PENYEDIA			SP2D			BAST BARANG		NILAI SEWA	PPN	PPH Pasal 4	JUMLAH NILAI PENERIMA
							NOMOR	TANGGAL	PERIODE SEWA dan Tgl .. s.d. Tgl...	ITEM	JUMLAH	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL				
1	Penyediaan jasa Penunjang dan Urusan Pemerintah daerah/ Belanja Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Nanny Nurviani, S.Sos/ No. HP. 082320020047	5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	01/INV/I/2025 Tgl. 30 Jan 2025	SUBONO Jl. H. Ungar Lr. Jawa No. 2 B Nomor HP. 089560025152	01/SPK-BPPP/SET/5.01.01.1.08.03/I/2025	30-Jan-25	30 Januari 2025 s/d 30 Januari 2026	3 Lantai, Luas bangunan 168 M2, Air Sumur, Listrik 1200VA, dan memiliki 3 kamar mandi	1 Ruko	50.000.000,00	01/INV/I/2025	30-Jan-25	50.000.000,00	21.00/04.0/000008/LS/5.01.5.05.0.00.24.0000/M/2/2025	27 Februari 2025	50.000.000,00	Nomor :18/BA-STHP/SET/08.03/I/2025	30 Januari 2025	50.000.000,00		5.000.000,00	45.000.000,00
TOTAL																					50.000.000,00		5.000.000,00	45.000.000,00

Perhitungan Beban Sewa Dibayar Dimuka							
Nilai sewa	Bulan	Tanggal Beban Sewa dibayar dimuka	Tanggal akhir tahun anggaran 2025	Perhitungan hari	Hari kalender	Beban Sewa Tahun Berjalan	Beban Sewa dibayar dimuka
50.000.000,00	12	30/01/2025	31/12/2025	-335	360	46.527.777,78	3.472.222,22
50.000.000,00						**46.527.777,78**	**3.472.222,22**

LAMPIRAN 3J

REKAPITULASI BEBAN SEWA DIBAYAR DIMUKA
PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2025
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA PPTK / NOMOR HP	KODE REKENING BELANJA	NAMA REKENING BELANJA	NOMOR BUKTI/ KWITANSI DAN TANGGAL	NAMA PENYEDIA, ALAMAT, NOMOR TELEPON	PERIKATAN (SURAT PERJANJIAN SEWA)			RINCIAN SEWA			KUITANSI PENYEDIA			SP2D			BAST BARANG		NILAI SEWA	PPN	PPH	JUMLAH NILAI PENERIMA
							NOMOR	TANGGAL	PERIODE SEWA dan Tgl .. s.d. Tgl...	ITEM	JUMLAH	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL				
1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Ria Hastuty	5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		Charles	011/128.A/BKAD/2025	27/052025	27/03/2025 S.D. 27/03/2026	RUKO	1	100.000.000,00				21.00/04.0/000093/LS/5.02.0.00.0.00.25.0000/P1/3/2025	27/03/2025	100.000.000,00	004/BAST/06.0010/BKAD/SKR-PPK/III/2025	27/03/2025	100.000.000,00	9.909.909,00	9.009.009,00	81.081.082,00
2	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Ria Hastuty	5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		Joko	002/SP-BKAD/5.02.01.1.06.0010/PRB-PPK/VI/2025	02-Jun-25	2/6/25 S.D. 2/6/26	RUKO	1	50.000.000,00				21.00/04.0/000170/LS/5.02.0.00.0.00.25.0000/P3/6/2025	10-Jun-25	50.000.000,00	005/BAST/06.0010/BKAD/SKR-PPK/VI/2025	02-Jun-25	50.000.000,00	4.954.955,00	4.504.505,00	40.540.540,00
3	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Ria Hastuty	5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		Jonnie	002/SP-BKAD/5.02.01.1.06.0010/PRB-PPK/XI/2025	03-Nov-25	3/11/25 S.D. 3/11/26	RUKO	1	50.000.000,00				21.00/04.0/000650/LS/5.02.0.00.0.00.25.0000/PR/11/2025	10-Nov-25	50.000.000,00	010/BAST/06.0010/BKAD/SKR-PPK/XI/2025	03-Nov-25	50.000.000,00	4.954.955,00	4.504.505,00	40.540.540,00
4	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Ria Hastuty	5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		Wui Kwet	012/128 A/BKAD/2025	05-Des-25	6/12/25 S.D. 6/12/26	RUKO	1	30.000.000,00				21.00/04.0/000811/LS/5.02.0.00.0.00.25.0000/PPR3/12/2025	29-Des-25	30.000.000,00	012/BAST/06.0010/BKAD/SKR-PPK/XII/2025	06-Des-25	30.000.000,00	2.972.973,00	2.702.703,00	24.324.324,00
TOTAL																					**230.000.000,00**	**22.792.792,00**	**20.720.722,00**	**186.486.486,00**

Perhitungan Beban Sewa Dibayar Dimuka							
Nilai sewa	Bulan	Tanggal Beban Sewa dibayar dimuka	Tanggal akhir tahun anggaran 2025	Perhitungan hari	Hari kalender	Beban Sewa Tahun Berjalan	Beban Sewa dibayar dimuka
100.000.000,00	12	27/03/2025	31/12/2025	279	360	77.500.000,00	22.500.000,00
50.000.000,00	12	02/06/2025	31/12/2025	212	360	29.444.444,44	20.555.555,56
50.000.000,00	12	03/11/2025	31/12/2025	58	360	8.055.555,56	41.944.444,44
30.000.000,00	12	06/12/2025	31/12/2025	25	360	2.083.333,33	27.916.666,67
230.000.000,00						**117.083.333,33**	**112.916.666,67**

LAMPIRAN 3K

REKAPITULASI BEBAN SEWA DIBAYAR DIMUKA
PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA PPTK / NOMOR HP	KODE REKENING BELANJA	NAMA REKENING BELANJA	NOMOR BUKTI/ KWITANSI DAN TANGGAL	NAMA PENYEDIA, ALAMAT, NOMOR TELEPON	PERIKATAN (SURAT PERJANJIAN SEWA)			RINCIAN			KUITANSI PENYEDIA			SP2D			BAST BARANG		NILAI SEWA	PPN	PPH	JUMLAH NILAI PENERIMA
							NOMOR	TANGGAL	PERIODE dan Tgl .. s.d. Tgl...	ITEM	JUMLAH	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL				
1	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Emilia ,S. Pd, S.T., M. Si/ 082169655906	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0001/VI/2025, Tanggal 17 Juni 2025	DARSONO PERUM CENTRE POINT BLOK D NO. 19-20, RT/RW. 001/014 KEL. TELUK TERING, KEC. BATAM KOTA, BATAM	530/SPK/BAPENDA/VI/2025	16-Jun-25	14 JUNI 2025 s.d 14 JUNI 2026	Sewa Kantor Gedung Arsip Blok D No. 10	1 UNIT/3 LANTAI	75.000.000,00	0001/VI/2025	16-Jun-25	75.000.000,00	21.00/04.0/000162/LS/5.02.0.00.0.00.26.0000/P4/7/2025	31-Jul-25	75.000.000,00	19/BAST/BAPENDA/VI/2025	17-Jun-25	75.000.000,00	0,00	7.500.000,00	67.500.000,00
2	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Emilia ,S. Pd, S.T., M. Si/ 082169655906	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0002/VI/2025, Tanggal 17 Juni 2025	TJAN AWANG KOMPLEK BUMI INDAH BLOK F NO. 5 RT/RW. 004/002, KEL. LUBUK BAJA KOTA, KEC. LUBUK BAJA, BATAM	531/SPK/BAPENDA/VI/2025	16-Jun-25	16 JUNI 2025 s.d 16 JUNI 2026	Sewa Kantor Gedung Arsip Blok D No. 11	1 UNIT/3 LANTAI	75.000.000,00	0002/VI/2025	16-Jun-25	75.000.000,00	21.00/04.0/000165/LS/5.02.0.00.0.00.26.0000/P4/7/2025	31-Jul-25	75.000.000,00	20/BAST/BAPENDA/VI/2025	17-Jun-25	75.000.000,00	0,00	7.500.000,00	67.500.000,00
3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Emilia ,S. Pd, S.T., M. Si/ 082169655906	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	01/07/2025, Tanggal 2 Juli 2025	HERIYANTI JL.M.T.HARYONO GRIYA BIMA JAYA NO.35 RT/RW.002/009 KEL.TG UNGGAT KEC.BUKIT BESTARI 08127068852	585/SPK/BAPENDA/VII/2025	01-Jul-25	2 JULI 2025 s.d 2 JULI 2026	Sewa Kantor Samsat Corner Batu 9 Tanjungpinang	1 UNIT/3 LANTAI	78.000.000,00	01/07/2025	2 Juli 2025	78.000.000,00	21.00/04.0/000164/LS/5.02.0.00.0.00.26.0000/P4/7/2025	31-Jul-25	78.000.000,00	03/BAST/BAPENDA/VII/2025	02-Jul-25	78.000.000,00	7.729.730,00	7.027.027,00	63.243.243,00
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Emilia ,S. Pd, S.T., M. Si/ 082169655906	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0002/VI/2025, Tanggal 17 Juni 2025	HASAN LIM KOMPLEK INDUSTRI SENTOSA PERDANA BLOK A NO. 1, BATU AJI - BATAM	000.3.1/937/SPK/BAPENDA/X/2025	21-Okt-25	21 OKTOBER 2025 s.d 21 OKTOBER 2026	Sewa Kantor UPTD PPD Batu Aji	2 UNIT/3 LANTAI NO. 03 dan 03. A	279.840.000,00	0067/PSS-INV/BTH/X/2025	22 Okt 2025	279.840.000,00	21.00/04.0/000403/LS/5.02.0.00.0.00.26.0000/PPR3/12/2025	30-Des-25	279.840.000,00	31/BAST/BAPENDA/X/2025	22-Okt-25	279.840.000,00	0,00	27.984.000,00	251.856.000,00
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Emilia ,S. Pd, S.T., M. Si/ 082169655906	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0002/VI/2025, Tanggal 17 Juni 2025	H.WAN INDRA GUNAWAN,SH Jl.H.Adam Malik Bandarsyah RT/RW 001/001 Kel.Bandarsyah Kec.Bunguran Timur 081371036645	000.3.1/989/SPK/BAPENDA/XI/2025	03-Nov-25	3 NOVEMBER 2025 s.d 3 NOVEMBER 2026	Sewa Kantor UPTD PPD Natuna	3 UNIT/3 LANTAI	130.660.000,00	01/X/2025	30 Okt 2025	130.660.000,00	21.00/04.0/000426/LS/5.02.0.00.0.00.26.0000/PPR3/12/2025	31-Des-25	130.660.000,00	02/BAST/BAPENDA/XI/2025	04-Nov-25	130.660.000,00	12.948.288,00	11.771.171,00	105.940.541,00
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Emilia ,S. Pd, S.T., M. Si/ 082169655906	5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	BTM/R/399/2025, Tanggal 17 November 2025	PT. Asuransi Jasaraharja Putera Jl. Raden Patah, Komp. Libra Centre Blok A, No. 4 Lubuk Baja, Batam	000.3/944/PDK.Surat Pesanan/BAPENDA/X/2025	24-Okt-25	16 NOVEMBER 2025 s.d 16 NOVEMBER 2026	Asuransi Gedung Graha Kepri	1 Dokumen Polis Asuransi Gedung Graha Kepri	91.002.592,00	BTM/R/399/2025	17-Nov-25	91.002.592,00	21.00/04.0/000404/LS/5.02.0.00.0.00.26.0000/PPR3/12/2025	30-Des-25	91.002.592,00	21/BAST/BAPENDA/XI/2025	17-Nov-25	91.002.592,00	0,00	0,00	91.002.592,00
7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Emilia ,S. Pd, S.T., M. Si/ 082169655906	5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	BTM/R/409/2025, Tanggal 17 November 2025	PT. Asuransi Jasaraharja Putera Jl. Raden Patah, Komp. Libra Centre Blok A, No. 4 Lubuk Baja, Batam	000.3/950/PDK.Surat Pesanan/BAPENDA/X/2025	24-Okt-25	16 NOVEMBER 2025 s.d 16 NOVEMBER 2026	Asuransi Kapal Kepri 6	1 Dokumen Polis Asuransi Kapal Kepri 6	46.050.570,00	BTM/R/409/2025	17-Nov-25	46.050.570,00	21.00/04.0/000402/LS/5.02.0.00.0.00.26.0000/PPR3/12/2025	30-Des-25	46.050.570,00	24/BAST/BAPENDA/XI/2025	17-Nov-25	46.050.570,00	0,00	0,00	46.050.570,00
8	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Emilia ,S. Pd, S.T., M. Si/ 082169655906	5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	BTM/R/403/2025, Tanggal 17 November 2025	PT. Asuransi Jasaraharja Putera Jl. Raden Patah, Komp. Libra Centre Blok A, No. 4 Lubuk Baja, Batam	000.3/948/PDK.Surat Pesanan/BAPENDA/X/2025	24-Okt-25	16 NOVEMBER 2025 s.d 16 NOVEMBER 2026	Asuransi UPTD PPD Tanjungpinang	1 Dokumen Polis Asuransi UPTD PPD Tanjungpinang	49.830.480,00	BTM/R/403/2025	17-Nov-25	49.830.480,00	21.00/04.0/000401/LS/5.02.0.00.0.00.26.0000/PPR3/12/2025	30-Des-25	49.830.480,00	20/BAST/BAPENDA/XI/2025	17-Nov-25	49.830.480,00	0,00	0,00	49.830.480,00
9	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Emilia ,S. Pd, S.T., M. Si/ 082169655906	5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	BTM/R/402/2025, Tanggal 17 November 2025	PT. Asuransi Jasaraharja Putera Jl. Raden Patah, Komp. Libra Centre Blok A, No. 4 Lubuk Baja, Batam	000.3/947/PDK.Surat Pesanan/BAPENDA/X/2025	24-Okt-25	16 NOVEMBER 2025 s.d 16 NOVEMBER 2026	Asuransi UPTD PPD Lingga	1 Dokumen Polis Asuransi UPTD PPD Lingga	15.656.616,00	BTM/R/402/2025	17-Nov-25	15.656.616,00	21.00/04.0/000381/LS/5.02.0.00.0.00.26.0000/PPR3/12/2025	30-Des-25	15.656.616,00	21/BAST/BAPENDA/XI/2025	17-Nov-25	15.656.616,00	0,00	0,00	15.656.616,00
10	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Emilia ,S. Pd, S.T., M. Si/ 082169655906	5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	BTM/R/404/2025, Tanggal 17 November 2025	PT. Asuransi Jasaraharja Putera Jl. Raden Patah, Komp. Libra Centre Blok A, No. 4 Lubuk Baja, Batam	000.3/949/PDK.Surat Pesanan/BAPENDA/X/2025	24-Okt-25	16 NOVEMBER 2025 s.d 16 NOVEMBER 2026	Asuransi UPTD PPD Tanjung Batu	1 Dokumen Polis Asuransi UPTD PPD Tanjung Batu	16.182.926,00	BTM/R/404/2025	17-Nov-25	16.182.926,00	21.00/04.0/000380/LS/5.02.0.00.0.00.26.0000/PPR3/12/2025	30-Des-25	16.182.926,00	19/BAST/BAPENDA/XI/2025	17-Nov-25	16.182.926,00	0,00	0,00	16.182.926,00
11	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Emilia ,S. Pd, S.T., M. Si/ 082169655906	5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	BTM/R/401/2025, Tanggal 17 November 2025	PT. Asuransi Jasaraharja Putera Jl. Raden Patah, Komp. Libra Centre Blok A, No. 4 Lubuk Baja, Batam	000.3/946/PDK.Surat Pesanan/BAPENDA/X/2025	24-Okt-25	16 NOVEMBER 2025 s.d 16 NOVEMBER 2026	Asuransi UPTD PPD Karimun	1 Dokumen Polis Asuransi UPTD PPD Karimun	16.182.926,00	BTM/R/401/2025	17-Nov-25	16.182.926,00	21.00/04.0/000379/LS/5.02.0.00.0.00.26.0000/PPR3/12/2025	30-Des-25	16.182.926,00	23/BAST/BAPENDA/XI/2025	17-Nov-25	16.182.926,00	0,00	0,00	16.182.926,00

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA PPTK / NOMOR HP	KODE REKENING BELANJA	NAMA REKENING BELANJA	NOMOR BUKTI/ KWITANSI DAN TANGGAL	NAMA PENYEDIA, ALAMAT, NOMOR TELEPON	PERIKATAN (SURAT PERJANJIAN SEWA)			RINCIAN			KUITANSI PENYEDIA			SP2D			BAST BARANG		NILAI SEWA	PPN	PPH	JUMLAH NILAI PENERIMA
							NOMOR	TANGGAL	PERIODE dan Tgl .. s.d. Tgl...	ITEM	JUMLAH	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL				
12	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Emilia ,S. Pd, S.T., M. Si/ 082169655906	5.1.02.02. 02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	BTM/R/400/2025, Tanggal 17 November 2025	PT. Asuransi Jasaraharja Putera Jl. Raden Patah, Komp. Libra Centre Blok A, No. 4 Lubuk Baja, Batam	000.3/945/PDK.Surat Pesanan/BAPENDA/X/2025	24-Okt-25	16 NOVEMBER 2025 s.d 16 NOVEMBER 2026	Asuransi UPTD PPD Bintan	1 Dokumen Polis Asuransi UPTD PPD Karimun	16.182.926,00	BTM/R/400/2025	17-Nov-25	16.182.926,00	21.00/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.26.0000/PPR3/12/2025	30-Des-25	16.182.926,00	22/BAST/BAPENDA/XI/2025	17-Nov-25	16.182.926,00	0,00	0,00	16.182.926,00
TOTAL																					**889.589.036,00**	**20.678.018,00**	**61.782.198,00**	**807.128.820,00**

Perhitungan Beban Sewa Dibayar Dimuka							
Nilai sewa	Bulan	Tanggal Beban Sewa dibayar dimuka	Tanggal akhir tahun anggaran 2025	Perhitungan hari	Hari kalender	Beban Sewa Tahun Berjalan	Beban Sewa dibayar dimuka
75.000.000,00	12	14/06/2025	31/12/2025	200	360	41.666.666,67	33.333.333,33
75.000.000,00	12	16/06/2025	31/12/2025	198	360	41.250.000,00	33.750.000,00
78.000.000,00	12	02/07/2025	31/12/2025	182	360	39.433.333,33	38.566.666,67
279.840.000,00	12	21/10/2025	31/12/2025	71	360	55.190.666,67	224.649.333,33
130.660.000,00	12	03/11/2025	31/12/2025	58	360	21.050.777,78	109.609.222,22
91.002.592,00	12	16/11/2025	31/12/2025	45	360	11.375.324,00	79.627.268,00
46.050.570,00	12	16/11/2025	31/12/2025	45	360	5.756.321,25	40.294.248,75
49.830.480,00	12	16/11/2025	31/12/2025	45	360	6.228.810,00	43.601.670,00
15.656.616,00	12	16/11/2025	31/12/2025	45	360	1.957.077,00	13.699.539,00
16.182.926,00	12	16/11/2025	31/12/2025	45	360	2.022.865,75	14.160.060,25
16.182.926,00	12	16/11/2025	31/12/2025	45	360	2.022.865,75	14.160.060,25
16.182.926,00	12	16/11/2025	31/12/2025	45	360	2.022.865,75	14.160.060,25
889.589.036,00						**229.977.573,94**	**659.611.462,05**

LAMPIRAN 3L

REKAPITULASI BEBAN SEWA DIBAYAR DIMUKA
PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2025
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA PPTK / NOMOR HP	KODE REKENING BELANJA	NAMA REKENING BELANJA	NOMOR BUKTI/ KWITANSI DAN TANGGAL	NAMA PENYEDIA, ALAMAT, NOMOR TELEPON	PERIKATAN (SURAT PERJANJIAN SEWA)			RINCIAN SEWA			KUITANSI PENYEDIA			SP2D			BAST BARANG		NILAI SEWA	PPN	PPH	JUMLAH NILAI PENERIMA
							NOMOR	TANGGAL	PERIODE SEWA dan Tgl .. s.d. Tgl...	ITEM	JUMLAH	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL	NILAI	NOMOR	TANGGAL				
1	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH / Penyediaan Bahan Logistik Kantor	HENDRA EKA PUTRA,SE	5.1.02.02. 005.00001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	25-Jul-25	Arga Permadi/Mahkota Alam Raya Cemara I/3 Tanjungpinang/081274 139089	004/B-SG/SPK/SET-DPRD/APBD/VII/2025	24-Jul-25	25 Juli 2025 s/d 24 Januari 2026	Bangunan Gedung	2 Unit	39.960.000,00	010/Faktur-AP/VII/2026	25-Jul-25	39.960.000,00	21.00/04.0/000502/LS/4.02.0.00.0.00.22.0000/PR/10/2025	17-Okt-25	39.960.000,00	004/BA-STP/SET-DPRD/APBD/VII/2025	25-Jul-25	39.960.000,00	3.960.000,00	3.600.000,00	32.400.000,00
TOTAL																					**39.960.000,00**	**3.960.000,00**	**3.600.000,00**	**32.400.000,00**

Perhitungan Beban Sewa Dibayar Dimuka

Nilai sewa	Bulan	Tanggal Beban Sewa dibayar dimuka	Tanggal akhir tahun anggaran 2025	Perhitungan hari	Hari kalender	Beban Sewa Tahun Berjalan	Beban Sewa dibayar dimuka
39.960.000,00	6	25-Jul-25	31-Des-25	159	180	35.298.000,00	4.662.000,00
39,960,000						**35.298.000,00**	**4.662.000,00**

LAMPIRAN 4A

DAFTAR OBAT-OBATAN YANG SUDAH KADALUARSA / RUSAK
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PER 31 DESEMBER 2025

OBAT-OBATAN

No	Nama Barang	Program	Sumber		Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Nilai Total	KONDISI
1	Alat suntik sekali pakai dengan jarum 3 ml	BUFFER	APBN	IFP	1.100	Pcs	650,00	715.000,00	ED APRIL 2025
2	Cloroquin 150 mg tab	BUFFER	APBN	IFP	6.000	Tablet	1.506,00	9.036.000,00	ED MARET 2025
3	Cloroquin 150 mg tab	BUFFER	APBN	IFP	500	Tablet	850,00	425.000,00	ED MARET 2025
4	Daclatasvir 60 Mg Tablet	PROGRAM	APBN	IFP	28	Tablet	12.250,00	343.000,00	ED APRIL 2025
5	Deteksi SARS CoV-2 Antigen Rapid Tes	PROGRAM	APBN	IFP	20	Test	10.400,00	208.000,00	ED SEPTEMBER 2025
6	Dolutegravir 10	PROGRAM	APBN	IFP	146	Botol	69.474,00	10.143.204,00	ED JULI 2025
7	Dolutegravir 10	PROGRAM	APBN	IFP	108	Botol	69.474,00	7.503.192,00	ED JULI 2025
8	Dolutegravir 50	PROGRAM	APBN	IFP	1.879	Botol	191.130,00	359.133.270,00	ED JUNI 2025
9	Ethambutol 100 Mg	PROGRAM	APBN	IFP	1.000	Tablet	670,00	670.000,00	ED JAN 2025
10	Lopinavir 200 Mg/Ritonavir 50 Mg (200/50)	PROGRAM	APBN	IFP	932	Botol	762.000,00	710.184.000,00	ED OKTOBER 2025
11	Lopinavir 200 Mg/Ritonavir 50 Mg (200/50)	PROGRAM	APBN	IFP	148	Botol	623.640,00	92.298.720,00	ED OKTOBER 2025
12	Nevirapine (NPV) 50Mg/5ml	PROGRAM	APBN	IFP	2	Botol	26.604,00	53.208,00	ED OKTOBER 2025
13	PPD Tuberculin Mamalian 5 TU/0,1 Ml	PROGRAM	APBN	IFP	985	Vial	117.264,00	115.505.040,00	ED SEPTEMBER 2025
14	Reagen Sifilis Trephocheck	PROGRAM	APBN	IFP	6.625	Test	4.385,00	29.050.625,00	ED OKTOBER 2025
15	Reagen Zn	PROGRAM	APBN	IFP	220	Kit	178.500,00	39.270.000,00	ED NOVEMBER 2025
16	Rifampisin 75 Mg/INH 50 Mg (3HR)	PROGRAM	APBN	IFP	42.336	Tablet	1.099,00	46.527.264,00	ED JUNI 2025
17	Vaksin IPV 5 ds	VAKSIN RUTIN	APBN	IFP	2.000	Vial	172.182,00	344.364.000,00	RUSAK
18	Zidovudin 300+Lamivudin 150	PROGRAM	APBN	IFP	71	Botol	243.000,00	17.253.000,00	ED SEPTEMBER 2025
19	Zidovudin 300+Lamivudin 150	PROGRAM	APBN	IFP	1.032	Botol	230.880,00	238.268.160,00	ED OKTOBER 2025
20	Zidovudin 300+Lamivudin 150	PROGRAM	APBN	IFP	1.414	Botol	245.220,00	346.741.080,00	ED OKTOBER 2025
21	Zidovudine 100mg (ZDV)	PROGRAM	APBN	IFP	16	Botol	93.300,00	1.492.800,00	ED OKTOBER 2025
	TOTAL							**2.369.184.563,00**	

DAFTAR OBAT-OBATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI YANG SUDAH KADALUARSA
INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025

OBAT-OBATAN

NO	NAMA OBAT	SATUAN	JUMLAH	HARGA PER PCS	JUMLAH HARGA	TGL KADALUARSA
	GUDANG					
1	FARGOXIN INJEKSI	AMP	150	27.750,00	4.162.500,00	JANUARI 2025
2	IRBESARTAN 300 MG	TAB	140	4.835,44	676.961,60	FEBRUARI 2025
3	INTERHISTIN TAB	TAB	400	776,00	310.400,00	FEBRUARI 2025
4	KABIMIDINE INJEKSI	VIAL	5	128.249,98	641.249,90	MARET 2025
5	BIOPLACENTON GEL	TUBE	4	28.860,00	115.440,00	MARET 2025
6	FARGOXIN INJEKSI	AMP	75	27.750,00	2.081.250,00	MEI 2025
7	KAEN 3B	KOLF	320	12.770,00	4.086.400,00	JUNI 2025
8	BETAMETASONE CREAM	TUBE	71	2.400,00	170.400,00	JULI 2025
9	ERLAMOL DROP	BTL	150	10.174,59	1.526.188,50	JULI 2025
10	KAEN 3 B	KOLF	220	12.770,00	2.809.400,00	JULI 2025
11	RENAPAR TABLET	TAB	100	2.220,00	222.000,00	AGUSTUS 2025
12	STELOSI 5 MG	TAB	400	512,00	204.800,00	Sep-22
13	CA GLUKONAS INJEKSI	AMP	240	12.099,97	2.903.992,80	Sep-25
14	FOLAPLUS TABLET	TABLET	100	519,00	51.900,00	30 NOVEMBER 2025
15	KAEN 3B	KOLF	120	12.770,00	1.532.400,00	30 NOVEMBER 2025
16	ETHIONAMID 250 MG	TAB	400	0,00	0,00	JANUARI 2025
17	MOXIFLOXACIN 400 MG	TAB	39	0,00	0,00	JANUARI 2025
18	CHLOROQUINE 150 MG	TAB	500	0,00	0,00	FEBRUARI 2025
19	OSELTAMIVIR 75 MG	TAB	300	0,00		MARET 2025
20	MOXIFLOXACIN 400 MG	TAB	100	0,00	0,00	MARET 2025
21	OSELTAMIVIR 75 MG	TAB	500	0,00	0,00	JUNI 2025
22	ETHAMBUTOL 400 MG	TAB	845	0,00	0,00	JUNI 2025
23	LEVOFLOXACIN 500 MG	TAB	250	0,00	0,00	Sep-22
24	MOXIFLOXACIN 400 MG TABLET	TABLET	650	0,00	0,00	30 NOVEMBER 2025
25	D-ARTEPP 20 MG / 160 MG	TABLET	18	0,00	0,00	02 NOVEMBER 2025
26	RIFAPENTINE 150 MG	TABLET	320	0,00	0,00	31 DESEMBER 2025
	DEPO IGD					
27	AMINOFUSIN PAED 250 ML	BOTOL	7	78.375,00	548.625,00	Dec-24
28	D5 1/2 NS	KOLF	9	12.849,00	115.641,00	Oct-24
29	D10 %	KOLF	1	11.851,00	11.851,00	Jul-24
30	D5 %	KOLF	1	11.204,00	11.204,00	May-24
31	SPIRONOLACTON 25 MG	TAB	60	360,00	21.600,00	Dec-24
32	ZUPREXA INJEKSI	VIAL	3	143.143,00	429.429,00	Dec-24
33	URIEF TABLET	TAB	23	3.093,00	71.139,00	DES 2024
34	LEVICA INJEKSI	AMP	9	75.077,00	675.693,00	Nov-24
35	D40 %	KOLF	2	9.712,00	19.424,00	May-24
36	DOBUTAMIN INJEKSI	AMP	2	17.718,00	35.436,00	Jul-24
37	DOPAMIN INJEKSI	AMP	5	8.249,00	41.245,00	Oct-24
38	AMINOPHILLIN INJEKSI	AMP	3	12.140,00	36.420,00	Oct-24
39	FAGOXIN INJEKSI	AMP	2	34.687,00	69.374,00	Jun-24
40	PREDNISONE 5 MG	TAB	140	183,15	25.641,00	Nov-24
41	TERAZOSIN 1 MG	TAB	102	833,75	85.042,50	Nov-24
42	KALIUM DIKLOFENAC 50 MG	TAB	100	535,85	53.585,00	Nov-24
43	GABAPENTIN 300 MG	TAB	25	822,51	20.562,75	Nov-24
44	KETOKONAZOL 200 MG	TAB	35	512,50	17.937,50	Aug-24
45	LEPARSON TABLET	TAB	23	6.092,50	140.127,50	Jul-24
46	HIDROKORTISON KRIM 2.5%	TUBE	4	13.875,00	55.500,00	Nov-24
47	CENDO VITROLENTA	BOTOL	2	41.805,00	83.610,00	Dec-24
48	CENDO POSOP	STRIP	1	67.016,00	67.016,00	Aug-24
49	PROPANOLOL 40 MG	TAB	22	161,02	3.542,35	Dec-24
50	OMEPRAZOL INJEKSI	VIAL	3	6.368,00	19.104,00	Feb-24
51	RANITIDIN INJEKSI	AMP	2	1.873,00	3.746,00	Mar-24

NO	NAMA OBAT	SATUAN	JUMLAH	HARGA PER PCS	JUMLAH HARGA	TGL KADALUARSA
52	FUROSEMID INJEKSI	AMP	2	2.330,00	4.660,00	Mar-21
53	EPINEFRIN INJEKSI	AMP	2	12.312,00	24.624,00	Jun-24
54	KETOROLAC INJEKSI	AMP	1	17.449,00	17.449,00	Oct-24
55	NATRIUM CHLORIDE 0.9%	KOLF	1	9.582,00	9.582,00	Sep-24
56	HYOSCINE BUTYLBROMIDE 20 MG	AMP	75	11.238,00	842.850,00	Oct-24
57	AMIKACIN 250 MG	AMP	87	20.343,00	1.769.841,00	Dec-24
58	VANCOMYCIN 0.5 G	VIAL	3	111.246,00	333.738,00	Dec-25
59	PIRACETAM 800 MG	TAB	8	805,00	6.440,00	Nov-24
60	DOPAMIN INJEKSI 40 mg/Ml	AMPUL	10	8.325,00	83.250,00	Jan-25
61	BENZATIN BENZIL INJEKSI 1200000 IU	VIAL	5	35.242,00	176.210,00	Jan-25
62	HALDOL INJ Ampul 50 mg/mL	AMPUL	3	136.250,00	408.750,00	Jan-25
63	BISOPROLOL TABLET 5 mg	TABLET	77	209,00	16.093,00	Jan-25
64	FOLAPLUS TABLET	TABLET	103	648,00	66.744,00	Jan-25
65	FENOFIBRAT TABLET 100 mg	KAPSUL	35	725,00	25.375,00	Jan-25
66	SALBULIN INHALER	PCS	3	35.575,00	106.725,00	Feb-25
67	CHLOROQUINE PHOSPAT 150 MG	TABLET	175	0,00	0,00	Feb-25
68	FLADYSTIN OVULA SUPPOS	PCS	2	24.194,00	48.388,00	Feb-25
69	MELOXICAM TABLET 7.5 mg	TABLET	36	298,00	10.728,00	Feb-25
70	DEXAMETHASONE INJEKSI Ampul 5 mg/mL, 1 mL	AMPUL	62	2.220,00	137.640,00	Feb-25
71	CLOZAPINE tab 25 mg	TABLET	45	650,00	29.250,00	Mar-25
72	LODOMER INJEKSI 5 mg/mL	AMPUL	8	12.636,00	101.088,00	Apr-25
73	FARGOXIN INJEKSI	AMPUL	3	34.687,00	104.061,00	May-25
74	DEXTRON 250 mg	TABLET	24	12.112,00	290.688,00	May-25
75	DEXTRON 500 mg	TABLET	30	79.920,00	2.397.600,00	May-25
76	CLINOLEIC 20 %	PACK	1	228.749,00	228.749,00	Jun-25
77	SERTRALINE TABLET 50 mg	TABLET	88	2.705,00	238.040,00	Jun-25
78	LEVOFLOXACIN TABLET 500 mg	TABLET	110	832,00	91.520,00	Jun-25
79	KAEN 3 B 500 ml	KOLF	53	15.962,00	845.986,00	Jun-25
80	BETAMETHASONE VALERATE KRIM 0.1 %	TUBE	6	3.000,00	18.000,00	Jul-25
81	KETANAEST 100 mg/mL	VIAL	1	194.597,00	194.597,00	Jul-25
82	ERLAMOL DROP	BOTOL	5	12.718,00	63.590,00	Jul-25
83	SULCOLON TABLET	TABLET	56	8.325,00	466.200,00	Jul-25
84	NYNDIA DROP	DROP	3	30.148,00	90.444,00	Aug-25
85	CENDO POSOP MDED	STRIP	2	67.016,00	134.032,00	Aug-25
86	CALCIUM GLUCONATE INJEKSI Ampul 95 mg/mL	AMPUL	17	15.124,00	257.108,00	Sep-25
87	PREGABALIN KAPSUL 75 mg	KAPSUL	16	1.266,00	20.256,00	Sep-25
88	HERBESER CD TAB 100 mg	KAPSUL	61	7.272,00	443.592,00	Jun-25
89	LEBBREST TAB 2.5 mg	TABLET	4	2.177,00	8.708,00	Jun-25
90	KIDMIN 7.2% AMINO ACID 200 ML	KOLF	1		0,00	Jul-25
91	FUROSEMID TABLET 40 mg	TABLET	10	328,00	3.280,00	Aug-25
92	DEXKETOPROFEN TROMETAMOL INJEKSI 25 mg	AMPUL	5	16.650,00	83.250,00	Sep-25
93	NOPRES 20 MG	TABLET	22		0,00	Oct-25
94	AMOXICILLIN TRIHYDRATE TABLET 500 mg	TABLET	200	687,00	137.400,00	Oct-25
95	ISONIAZID TABLET (INH) 300 mg	TABLET	98	762,00	74.676,00	Oct-25
96	Prontosan wound irrigation Solution 350 ml	BOTOL	2	278.277,00	556.554,00	Oct-25
97	PREGABALIN KAPSUL 75 mg	KAPSUL	28	1.266,00	35.448,00	Oct-25
98	DEXKETOPROFEN TROMETAMOL INJEKSI 25 mg	AMPUL	20	16.650,00	333.000,00	Oct-25
99	DONEPEZIL TABLET 5 mg	TABLET	88	5.411,00	476.168,00	Oct-25
100	GLAUSETA TAB	TABLET	67	4.193,00	280.931,00	Oct-25
101	SYMBICORT TURBUHALER 160 (120 DOSES)	PCS	20	235.680,00	4.713.600,00	Oct-25
102	DEXKETOPROFEN TROMETAMOL INJEKSI 25 mg	AMPUL	15	16.650,00	249.750,00	Nov-25
103	KAEN 3 B 500 ml	KOLF	18	15.962,00	287.316,00	Nov-25
104	OXORIL SYR	BOTOL	3	27.056,00	81.168,00	Nov-25
105	FLUOXETINE HCL 20 mg	KAPSUL	50	532,00	26.600,00	Nov-25

NO	NAMA OBAT	SATUAN	JUMLAH	HARGA PER PCS	JUMLAH HARGA	TGL KADALUARSA
106	CANDESARTAN CILEXETIL TABLET 16 mg	TABLET	100	603,00	60.300,00	Nov-25
107	SILDENAFIL CITRATE 50 mg	TABLET	7	16.250,00	113.750,00	Nov-25
108	TYGACIL INJEKSI 50 mg	VIAL	1	1.343.010,00	1.343.010,00	Dec-25
109	DIVALPROEX 250 mg	TABLET	100	1.110,00	111.000,00	Jan-26
110	NOKOBA Ampul 0.4 mg/mL	AMPUL	3	134.760,00	404.280,00	Jan-26
111	HYOSCINE BUTYLBROMIDE Ampul 20 mg/mL, 1 mL	AMPUL	63	11.238,00	707.994,00	Jan-26
112	LEPARSON TABLET	TABLET	88	6.092,00	536.096,00	Jan-26
113	PIRASETAM TABLET 800 mg	TABLET	70	775,00	54.250,00	Jan-26
114	EPHEDRINE HYDROCHLORIDE INJEKSI Ampul 50 mg/mL	AMPUL	12	31.322,00	375.864,00	Jan-26
115	ACYCLOVIR KRIM 5 %	TUBE	9	6.853,00	61.677,00	Jan-26
	DEPO RAWAT INAP					
116	FOLAPLUS TABLET	TAB	162	648,75	105.097,50	AGUSTUS 2025
117	FOLAPLUS TABLET	TAB	283	648,75	183.596,25	OKTOBER 2025
118	ZONIA TABLET 10 MG	TAB	14	18.125,00	253.750,00	Nov-25
119	OXORIL SYR	BOTOL	1	27.056,25	27.056,25	Nov-25
120	FARMABES INJEKSI Ampul	AMP	4	133.546,88	534.187,52	Nov-25
121	FIBRION 1.500.000 IU	AMP	4	4.937.499,78	19.749.999,12	DESEMBER 2025
122	CALCIUM GLUCONATE INJEKSI Ampul 95 mg/Ml	AMP	79	15.125,01	1.194.875,79	Sep-25
123	SERUM ANTI BISA ULAR /ABU 5 ml (BIOSAVE)	VIAL	13	1.456.728,75	18.937.473,75	AGUSTUS 2025
124	RENAPAR KAPLET	TAB	22	2.775,00	61.050,00	AGUSTUS 2025
125	ISONIAZID TABLET (INH) 300 mg	TAB	98	762,50	74.725,00	OKTOBER 2025
126	KAMYFET TABLET (cellcept) 500 mg	TAB	40	21.093,75	843.750,00	Nov-25
127	DEFERIPRONE TABLET 500 mg	TAB	46	9.615,00	442.290,00	AGUSTUS 2025
128	HIDROKLORTIAZIDA TABLET (HCT) 25 mg	TAB	27	212,50	5.737,50	JULI 2025
129	BETAMETHASONE VALERATE KRIM 0.1 %	TUBE	7	3.000,00	21.000,00	JULI 2026
130	GLAUSETA TAB	TAB	79	4.193,75	331.306,25	Nov-25
131	KETOKONAZOL TABLET 200 mg	TAB	27	531,25	14.343,75	AGUSTUS 2025
132	DOPAMIN INJEKSI Ampul 40 mg/mL	AMP	3	8.325,00	24.975,00	Sep-25
133	DOBUTAMIN INJEKSI Ampul 50 mg/mL	AMP	1	17.482,50	17.482,50	Nov-25
134	NOREPINEPHRINE BITARTRATE Ampul 1 mg/mL	AMP	1	16.608,38	16.608,38	AGUSTUS 2025
135	LIDOCAINE HCL INJEKSI Ampul 20 mg/mL, 2 mL	AMP	1	1.665,00	1.665,00	AGUSTUS 2026
136	DIPENHIDRAMIN INJEKSI Ampul 10 mg/mL	AMP	2	2.775,00	5.550,00	Nov-25
137	AMIODARONE INJEKSI Ampul 50 mg/mL, 3 mL	AMP	4	13.354,69	53.418,76	JULI 2026
138	D-ARTEPP/ DHP 40 MG/320 MG (DINKES)	TAB	12	-	-	JULI 2027
139	SYMBICORT TURBUHALER 160 (120 DOSES)	BOTOL	5	235.680,75	1.178.403,75	DESEMBER 2025
140	PERMETHRIN KRIM 5 %	TUBE	7	8.301,41	58.109,87	OKTOBER 2025
141	DESOKSIMETASON KRIM 2.5	TUBE	4	13.181,25	52.725,00	Nov-25
142	MOMETASON KRIM 5 g	TUBE	1	9.625,00	9.625,00	Nov-25
143	CENDO POSOP MDED	TUBE	2	67.016,25	134.032,50	Sep-25
144	MOXIMOXIFLOXACIN TAB 400 MG (DINKES)	TAB	10	-	-	Nov-25
145	ERLAMOL DROP	PCS	10	10.174,59	101.745,90	Jul-25
146	KAEN 3 B 500 ml	SOFBAG	1	15.962,50	15.962,50	Nov-25
	DEPO RAWAT ICU OK					
147	PLEGIOCARD INJEKSI	AMP	8	98.806,85	790.454,80	Nov-25
148	PROSUL INJEKSI	AMP	10	121.274,99	1.212.749,90	Nov-25
149	FARGOXIN INJEKSI	AMP	10	34.687,50	346.875,00	May-25
150	AMIODARON INJEKSI	AMP	11	13.354,69	146.901,59	Jul-25
151	DOPAMIN INJEKSI	AMP	1	8.325,00	8.325,00	Sep-25
152	KABIMIDINE INJEKSI	VIAL	12	160.312,48	1.923.749,76	Mar-25
	DEPO RAWAT JALAN					
159	PROPYLTHIOURACIL 100 mg	TAB	30	472,00	14.160,00	JANUARI 2025

NO	NAMA OBAT	SATUAN	JUMLAH	HARGA PER PCS	JUMLAH HARGA	TGL KADALUARSA
160	INTERHISTIN 50 mg	TAB	80	776,00	62.080,00	FEBRUARI 2025
161	CHLOROQUIN (DINKES)	TAB	633	0,00	0,00	FEBRUARI 2025
162	IRBESARTAN 300 mg	TAB	29	3.868,00	112.172,00	FEBRUARI 2025
163	OSELTAMIVIR 75 mg (HIBAH COVID)	TAB	50	0,00	0,00	MARET 2025
164	AMIODARONE INJ	AMP	2	10.683,00	21.366,00	MARET 2025
165	RL 500 ml	KOLF	1	7.649,00	7.649,00	APRIL 2025
166	VITAMIN B6 100 mg (DINKES)	TAB	385	0,00	0,00	APRIL 2025
167	NaCL 0.9% 500 ml	KOLF	2	7.290,00	14.580,00	APRIL 2025
168	D5% 500 ml	KOLF	1	7.302,00	7.302,00	MEI 2025
169	VENTOLIN NEBU	KOLF	2	8.205,00	16.410,00	MEI 2025
170	FARGOXIN INJ	AMP	4	27.750,00	111.000,00	MEI 2025
171	ETHAMBUTOL 500 mg (DINKES)	TAB	58	0,00	0,00	JUNI 2025
172	AMINOPILIN INJ	AMP	3	6.993,00	20.979,00	JUNI 2025
173	RL 500 ml	KOLF	1	7.649,00	7.649,00	JUNI 2025
174	EPINEPRIN INJ	AMP	10	5.537,00	55.370,00	JUNI 2025
175	DOLUTEGRAVIR SODIUM (DINKES)	TAB	510	0,00	0,00	JUNI 2025
176	TLD (DINKES)	TAB	68	0,00	0,00	JUNI 2025
177	TLE (DINKES)	TAB	44	0,00	0,00	JUNI 2025
178	BETAMETASON CREAM	TUBE	20	2.400,00	48.000,00	JULI 2025
179	AMIODARONE INJ	AMP	3	10.683,00	32.049,00	JULI 2025
180	SPIRONOLACTONE 25 mg	TAB	50	288,00	14.400,00	JULI 2025
181	CALCIUM GLUCONATE INJ	AMP	4	12.100,00	48.400,00	AGUSTUS 2025
182	STELOSI 5 mg	TAB	70	512,00	35.840,00	SEPTEMBER 2025
183	CALCIUM GLUCONATE INJ	AMP	6	12.100,00	72.600,00	SEPTEMBER 2025
184	LEVOFLOXACIN 500 mg (DINKES)	TAB	18	0,00	0,00	OKTOBER 2025
185	ISONIAZID 300 mg (DINKES)	TAB	410	0,00	0,00	OKTOBER 2025
186	DEXKETOPROFEN INJ	AMP	5	13.320,00	66.600,00	OKTOBER 2025
187	MOXIFLOXACIN 400 mg (DINKES)	TAB	94	0,00	0,00	NOVEMBER 2025
188	GALUSETA 250 mg	TAB	18	3.355,00		NOVEMBER 2025
189	DIPHENIHIDRAMIT INJ	AMP	6	2.220,00	13.320,00	NOVEMBER 2025
TOTAL OBAT					**Rp 95.039.261**	

BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

NO	NAMA BAHAN LAINNYA	SATUAN	JUMLAH	HARGA PER PCS	JUMLAH HARGA	TGL KADALUARSA
	GUDANG					
1	BENANG T-VIO 4/0 TS 18 JARUM SEGITIGA	PCS	36	Rp 78.485,00	Rp 2.825.460	31 AGUSTUS 2025
2	MASKER 3 PLY	BOX	274	Rp -	Rp -	JULI 2024
3	MASKER N95 DREAMCAM	PCS	860	Rp -	Rp -	DESEMBER 2022
	DEPO IGD					
4	MEDIFIX LINE 100cm	PCS	3	Rp 274.447,00	Rp 823.341	Jan-25
5	INA-SHUNT KIT dewasa SEMILUNAR FLUSH (Adult /LOW)	PCS	1	Rp 2.884.775,00	Rp 2.884.775	Feb-25
6	Tracheal tube with cuff 7 cm (TRACHEOS TOMY)	PCS	2	Rp 274.447,00	Rp 548.894	Feb-25
7	Thoracic Cateter no.12 (THORAK CATETER)	PCS	2	Rp 165.968,00	Rp 331.936	Mar-25
8	INA-SHUNT KIT dewasa SEMILUNAR FLUSH (Adult /LOW)	PCS	1	Rp 2.884.775,00	Rp 2.884.775	Mar-25
9	BONE WAX (HEMOSTASIS TULANG)	PCS	3	Rp 164.881,00	Rp 494.643	Mar-25
10	INA-SHUNT KIT dewasa SEMILUNAR FLUSH (Adult /MEDIUM)	PCS	1	Rp 2.884.775,00	Rp 2.884.775	May-25
11	Alat Suntik AGD	PCS	1	Rp 33.647,00	Rp 33.647	May-25
12	BLADE no. 11 (BISTURI)	PCS	12	Rp 1.317,00	Rp 15.804	May-25
13	CYTO SET INFUSION, 215cm w/5 NF VALVE	PCS	1	Rp 269.341,00	Rp 269.341	Sep-25
14	EVD (External Ventricular Drainage) Set	PCS	1	Rp 3.778.440,00	Rp 3.778.440	Sep-25
15	Simple Mask dewasa (ADULT)	PCS	2	Rp 33.003,00	Rp 66.006	Nov-25
16	Benang T vio poliglicolid round bodied no 3/0 jarum bulat	PCS	5	Rp 89.099,00	Rp 445.495	Nov-25
	DEPO RAWAT INAP					
17	Urine cateter 2 way no. 14, silicon elastomar (SELANG CATETER)	PCS	1	Rp 14.651,00	Rp 14.651	JULI 2025

NO	NAMA OBAT	SATUAN	JUMLAH	HARGA PER PCS	JUMLAH HARGA	TGL KADALUARSA
	DEPO ICU OK					
18	SPINOCAIN 22	PCS	25	Rp 27.893,25	Rp 697.331	May-25
19	POLYPROPILENE 7.0 TAPER	PCS	5	Rp 280.128,50	Rp 1.400.643	Oct-25
20	POLYPROPILENE 6.0 TAPER	PCS	11	Rp 21.577,45	Rp 237.352	Aug-25
21	MESH HERNIA 11 X 6	PCS	1	Rp 235.897,20	Rp 235.897	Sep-24
22	VENFLON 18	PCS	1	Rp 19.400,00	Rp 19.400	Dec-24
23	ETT CUFFED NO.3.0	PCS	6	Rp 44.677,50	Rp 268.065	Sep-20
	DEPO RAWAT JALAN					
24	ETT 3.5 UNCUFFED	PCS	2	Rp 25.530,00	Rp 51.060	JANUARI 2025
25	ABOCATH 16G	PCS	1	Rp 37.740,00	Rp 37.740	JANUARI 2025
26	VENFLON 24G	PCS	3	Rp 21.978,00	Rp 65.934	FEBRUARI 2025
27	NEBULIZER ADULT	PCS	1	Rp 25.530,00	Rp 25.530	MARET 2025
28	ABOCATH 18G	PCS	1	Rp 37.740,00	Rp 37.740	APRIL 2025
29	NRM ANAK	PCS	2	Rp 24.420,00	Rp 48.840	APRIL 2025
30	ETT 7.0 CUFFED	PCS	1	Rp 194.250,00	Rp 194.250	APRIL 2025
31	ETT 7.5 CUFFED	PCS	1	Rp 194.000,00	Rp 194.000	MEI 2025
32	GUEDLE 2\70 mm	PCS	1	Rp 14.430,00	Rp 14.430	MEI 2025
33	SUCTION CATHETER 14	PCS	1	Rp 9.324,00	Rp 9.324	MEI 2025
34	NRM ANAK	PCS	1	Rp 24.420,00	Rp 24.420	MEI 2025
35	BLOOD SET	PCS	1	Rp 39.849,00	Rp 39.849	JUNI 2025
36	CATHEGELL	PCS	1	Rp 78.500,00	Rp 78.500	NOVEMBER 2025
TOTAL BMHP					**Rp 21.982.288**	
TOTAL OBAT-OBATAN + BAHAN MEDIS HABIS PAKAI					**Rp 117.021.549**	

LAMPIRAN 4C

DAFTAR OBAT-OBATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI YANG SUDAH KADALUARSA
RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PER 31 DESEMBER 2025

OBAT-OBATAN

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KEMASAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TANGGAL KADALUARSA
1	ACARBOSE 50 MG (DUS 100 TAB) ISI : 100	3	box	73.514,00	220.542,00	31/12/2025
2	ACYCLOVIR 400MG/100 TABLET	15	box	64.414,43	966.216,50	31/05/2025
3	Amiodarone IV (G) (DVRS)	6	box	41.280,00	247.680,00	31/03/2025
4	Amitriptylline 25 MG Tab 100'S FAH	39	box	18.918,92	737.837,88	30/11/2025
5	Benang Catgut Plain 3-0	24	pcs	31.455,00	754.920,00	31/12/2025
6	Benang Catgut Plain 4-0	12	pcs	30.455,00	365.460,00	30/11/2025
7	Benzathine Benzylpenicillin @10amp	3	box	203.200,00	609.600,00	31/01/2025
8	Betametason 0.1%	100	tube	1.892,00	189.200,00	30/04/2025
9	Bisacodyl 5MG Tab @100	33	box	15.135,00	499.455,00	09/07/2025
10	Calcium Gluconate Injeksi	8	box	135.243,24	1.081.945,92	30/06/2025
11	Cendo Floxa Minidose	20	blister	24.877,50	497.550,00	30/09/2025
12	Cendo Lyteers 0,6 ml @ 5'S Minidose	100	blister	17.325,00	1.732.500,00	30/11/2025
13	Cendo Protagenta	25	blister	33.363,75	834.093,75	31/08/2025
14	Cendo Tobroson Minidose	60	blister	26.970,00	1.618.200,00	30/09/2025
15	CEPEZET Tab 100MG@100	11	box	52.000,00	572.000,00	31/12/2025
16	Cetirizine Sirup 5 MG/5ML @60ML Fornas	60	botol	4.199,10	251.946,00	30/06/2025
17	Chlorpromazine 100MG	50	box	47.297,30	2.364.865,00	31/05/2025
18	Dexamethasone Tab 0.5 MG 10X10 Fornas	31	box	6.216,22	192.702,82	31/08/2025
19	DIMENHYDRINATE 50 MG (DUS 100 TAB)	13	box	14.324,00	186.212,00	31/07/2025
20	Ephedrine HCL 50MG/ML INJ	2	box	225.000,00	450.000,00	31/03/2025
21	Farmabes	7	box	147.400,00	1.031.800,00	31/07/2025
22	FLAMERGI EYE DROPS	5	botol	17.595,00	87.975,00	01/03/2025
23	Folic Acid Tab 0.4 MG 10X10 Fornas	37	box	5.225,23	193.333,51	31/07/2025
24	HYDROCORTISONE 2.5%CR @5GRAM	168	tube	2.649,00	445.032,00	31/08/2025
25	INTERDOXIN 50 MG CAP/BOX	10	box	35.574,00	355.740,00	31/05/2025
26	LEVOTHYROXINE 100 MCG TAB	27	box	21.000,00	567.000,00	31/05/2025
27	Meylon 84 25 ML	24	ampul	6.757,00	162.168,00	06/09/2025
28	MGSO4 40 25ML	36	ampul	5.100,00	183.600,00	11/08/2025
29	NEOSTIGMIN METILSULFATE 0.5MG/ML INJ 5AMP@1ML	6	box	54.505,00	327.030,00	31/07/2025
30	OTILON TETES TELINGA 3ML	1	botol	36.167,75	36.167,75	31/12/2025
31	OTSU-D40 (40% DEXTROSE INJ) 25 ML DPHO	186	box	7.000,00	1.302.000,00	31/12/2025
32	Pamol 125 Mg Supp 12 Supp/Box	13	box	124.888,00	1.623.544,03	30/11/2025
33	POTASSIUM CHORIDE 7,4% 25 ML	48	ampul	3.333,43	160.004,62	09/06/2025
34	Pramifrol ER 0.375MG Tablet 30'S	3	box	152.910,50	458.731,50	30/06/2025

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KEMASAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TANGGAL KADALUARSA
35	TRANEXAMIC ACID 500MG TAB	24	box	135.135,14	3.243.243,36	31/03/2025
36	Zinc Sulfate Monohydrate	12	box	45.041,50	540.498,00	28/02/2025
	Total				25.090.794,64	

LAMPIRAN 4D

DAFTAR BAHAN HABIS PAKAI YANG SUDAH RUSAK / KADALUARSA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PER 31 DESEMBER 2025

BAHAN-BAHAN KIMIA

NO	NAMA	MERK	PENERIMAAN						KETERANGAN
			Tgl. Terima	No./ Tgl. Surat Dasar Penerimaan	Jumlah Barang		Harga Satuan + Pajak	Jumlah Harga	
1	Hand Sanitizer	HandSanitizer 5 L	15-Dec-22	222/SP/APBD/BPBD.KL.07/2022	5	Dirigen	499.500	2.497.500	Expired
2	Antiseptic	Sterald 30High Level Disinfectant Galon 5 Ltr	15-Dec-22	224/SP/APBD/BPBD.KL.07/2022	174	Botol	433.500	75.429.000	Expired
3	Ice Gel Pack	-	03-Oct-23	212/BNPB/D-V/R.T.03.05/10/2023	4	Pcs	10.000	40.000	Expired
		JUMLAH						**77.966.500**	

LAMPIRAN 4E

DAFTAR BAHAN HABIS PAKAI YANG SUDAH RUSAK / KADALUARSA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PER 31 DESEMBER 2025

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga Satuan (Rp)
1	Cetak Karcis	Pad	91.591	205,00	18.776.155,00
Total					**18.776.155,00**

DAFTAR TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025

LAMPIRAN 5A

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	897,00	2014	Jakarta Desa/Kelurahan Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA	Hak Pakai	5-Mar-15	HP. 09.01.06.01.4.00428 (897 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	29.600.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Jakarta	Kantor Penghubung Jakarta
2	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0001	16.000,00	2018	Jalan Adisucipto, Tanjungpinang	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.02.01.4,00196, (5.213 m2) 32.05.02.01.4.00197 (2.549 m2) 32.05.02.01.4.00198 (1.163 m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	9.517.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	jalan adi sucipto
3	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0003	9.002,00	2018	Jalan Bakar Batu, Tanjungpinang	Hak Pakai	24-Sep-19	32.05.01.01.4.00875 (9.002 m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	12.568.584.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Jalan Bakar Batu
4	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0004	13.280,00	2018	Jalan Brigjen Katamso, Tanjungpinang	Hak Pakai	24-Sep-19	32.05.04.02.4.00206 (13.280 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	47.131.461.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	JALAN BRIGJEN KATAMSO
5	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0006	7.334,00	2018	Jl. Dr. SUtomo	Hak Pakai	20-Dec-19	32.05.03.04.4.00036 (7.334 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	13.869.030.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	SUTOMO
6	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0007	21.341,00	2018	Jalan Gatot Subroto, Tanungpinang	Hak Pakai	8-Dec-20	32.05.02.02.4.00028 (21.341 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	30.736.650.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Jalan gatot subroto
7	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0009	8.230,00	2018	Jalan Ir Sutami, Tanjungpinang	Hak Pakai	10-Sep-21	32.05.04.01.4.00128 (8.230 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	42.235.536.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	JALN IR SUTAMI
8	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0010	15.513,00	2018	Jalan MT Haryono, Tanjungpinang	Hak Pakai	24-Sep-19	32.05.04.02.4.00205 (15,513 m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	35.290.640.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Jalan MT haryono
9	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0012	6.350,00	2018	Jalan RE Martadinata, Tanjungpinang	Hak Pakai	24-Sep-19	32.05.02.02.4.00027 (6.350 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	6.459.460.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	R.E MARTADINATA
10	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0013	4.620,00	2018	Jalan Sunaryo, Tanjungpinang	Hak Pakai	20-Nov-19	32.05.03.04.4.00034 (4.620 m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	11.474.232.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	jalan sunaryo
11	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0014	8.725,00	2018	Jalan Tugu Pahlawan, Tanjungpinang	Hak Pakai	20-Dec-19	32.05.03.04.4.00035 (8.725 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	30.885.462.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	JALAN TUGUH PAHLAWAN
12	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0015	49.020,00	2018	Jalan Wiratno Pulau Dompak Tanjungpinang	Hak Pakai	20-Dec-19	32.05.03.03.4.00032 (49.020 m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	58.396.538.800,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	JALAN WIRATNO
13	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0016	65.110,00	2018	Jalan WR. Supratman, Tanjungpinang	Hak Pakai	24-Sep-19	32.05.02.05.4. 00046 (65.110 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	64.703.639.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	JALAN WR SUPRATMAN
14	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0017	16.320,00	2018	Jl. Nusantara Batas Kota, Tanjungpinang	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.02,05.4.00244 (13.745 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	3.278.366.700,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	BADAN JALAN NUSANTARA
15	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0021	35.000,00	2020	Jalan Sei Nam Laut	Hak Pakai	23-Sep-22	32.01.01.04.4.00014	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	805.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
16	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0093	161,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	95.832.828,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Netti Erwanti No Bidang 63 SHM No.00344
17	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0094	160,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	88.934.862,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Raisal Phait No Bidang 68 SHM No.00349
18	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0095	160,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	88.934.862,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Tanjung Permai Kab. Bintan
19	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0096	24,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.06.04.4.00004	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	30.968.236,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Junaidi. D No.Bidang 55 Reg No.265/SKL/2020
20	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0097	10,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	14-Apr-22	32.01.08.05.4.00006	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	23.567.711,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Zanimar No Bidang 80 SHM No.00358

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
21	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0098	627,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00010	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	88.345.804,46	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Armi Nasution No.Bidang 15 No.582/BU/1993
22	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0099	33,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	14-Apr-22	32.01.08.05.4.00006	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	21.958.318,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Sri Sudaryanti No Bidang 78 SHM No.00361
23	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0100	160,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	90.232.727,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Netti Erwanti No Bidang 64 SHM No.00345
24	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0101	176,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	97.899.975,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Toni Wijaya No Bidang 69 SHM No.00351
25	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0102	769,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00002	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	26.979.036,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Syofyan Rida No. Bidang 37 SHM No.00769
26	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0103	1.480,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00013	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	759.405.136,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.TANDY WINNERLY No Bidang 44 Kuasa Menjual No.2
27	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0230	1.135,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00009	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	158.837.790,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Syamsuddin No Bidang 26 SHM No.00820
28	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0231	480,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00009	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	67.947.532,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Berta Yudhi Kusumawardana No Bidang 28 SHM No.00818
29	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0232	1.677,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	13-May-22	32.01.08.05.4.00015	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	100.740.464,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Hamidah No.Bidang 81
30	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0233	1.294,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00009	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	174.797.870,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Saifuddin No.Bidang 29
31	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0234	2.299,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00007	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.105.537.735,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Suhirman No.Bidang 71 Reg No.42/SKL/2020
32	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0236	-	2021	Tg.Uban Selatan	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00009	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	27.737.746,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Sifuddin No.Bidang 25 Reg No.56/SKL/2019
33	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0237	1.702,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00013	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	818.669.035,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Suhirman No.Bidang 121
34	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0238	14.109,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	13-May-22	32.01.08.05.4.00015	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	804.118.098,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Suhirman No.Bidang 121
35	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0239	839,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	13-May-22	32.01.08.05.4.00014	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	50.667.624,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT.Citra Inti Cakrawala Bintan No.Bidang 93
36	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0240	1.425,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	13-May-22	32.01.03.03.4.00022	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	98.145.663,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT.Citra Inti Cakrawala Bintan No.Bidang 95
37	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0241	3.291,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	13-May-22	32.01.08.05.4.00015	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	194.478.298,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT.Citra Inti Cakrawala Bintan No.Bidang 90
38	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0242	2.448,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	13-May-22	32.01.08.05.4.00015	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	149.872.790,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT.Citra Inti Cakrawala Bintan No.Bidang 90
39	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0243	3.862,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.03.03.4.00023	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	399.718.786,96	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT.Citra Inti Cakrawala Bintan No.Bidang 101
40	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0244	150,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	14-Apr-22	32.01.08.05.4.00006	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	83.426.292,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Desi Sutriani No Bidang 74 SHM No.00357
41	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0245	150,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	14-Apr-22	32.01.08.05.4.00006	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	66.050.321,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Desi Sutriani No Bidang 77 SHM No.00354
42	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0246	444,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	317.891.236,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Sugiono No Bidang 53 SHM No.00599
43	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0247	1.935,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00013	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	930.629.736,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Abdul Rachman Julianto No Bidang 43 SHM No.00855
44	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0248	3.529,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00009	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	470.836.592,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Witono No.Bidang 30 Reg No.639/BU/1994

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
45	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0249	2.049,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00011	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	274.647.435,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Hartono No.Bidang 11 SHM No.898
46	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0250	18.598,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00011	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	3.164.767.221,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Hartono No.Bidang 9 SHM No.894
47	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0251	884,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00013	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	426.605.435,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Yosse Adrian No.Bidang 117
48	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0252	875,00	2021	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Fetty Fatimah No.Bidang 120	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00013	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	421.281.735,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Fetty Fatimah No.Bidang 120
49	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0253	656,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	13-May-22	32.01.08.05.4.00015	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	41.785.517,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Fetty Fatimah No.Bidang 120
50	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0254	1.302,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00011	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	176.754.537,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Hartono No.Bidang 13
51	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0255	261,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	14-Apr-22	32.01.08.05.4.00006	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	154.192.390,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.James Winter Pasaribu No Bidang 75 SHM No.00355
52	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0256	6.047,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	13-May-22	32.01.08.05.4.00015	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	689.245.660,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Wan Zakir No Bidang 56 SHM No.00340
53	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0257	1.149,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00011	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	557.525.411,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Huang Huang No Bidang 4 SHM No.02396
54	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0258	346,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	205.220.666,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Sumarno No Bidang 62 SHM No.00343
55	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0259	2.198,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00005	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	282.475.136,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Sudarso No.Bidang 40 Register.266/SKL/2020
56	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0260	12.662,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	13-May-22	32.01.08.05.4.00015	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	721.626.575,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT.Citra Inti Cakrawala Bintan No.Bidang 92
57	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0261	9.109,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	13-May-22	32.01.08.05.4.00015	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	519.074.823,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT.Citra Inti Cakrawala Bintan No.Bidang 83
58	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0262	3.570,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	13-May-22	32.01.08.05.4.00015	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	210.983.917,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT.Citra Inti Cakrawala Bintan No.Bidang 85
59	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0263	66,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.03.03.4.00023	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	27.393.781,96	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Mustika Adjie No.Bidang 99 Reg No.33/BU/2016
60	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0264	3.665,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.03.03.4.00023	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	355.790.882,96	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT.Citra Inti Cakrawala Bintan No.Bidang 98
61	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0265	7.074,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	13-May-22	32.01.08.05.4.00015	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	410.671.252,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT.Citra Inti Cakrawala Bintan No.Bidang 82
62	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0266	10.701,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	13-May-22	32.01.08.05.4.00015	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	609.832.602,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT.Citra Inti Cakrawala Bintan No.Bidang 87
63	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0267	155,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	13-May-22	32.01.08.05.4.00015	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	13.279.160,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT.Citra Inti Cakrawala Bintan No.Bidang 84
64	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0268	332,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	197.640.971,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Elisa Novita No.Bidang 58 SHM No.00360
65	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0269	109,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	413.749.477,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Usaha An.Gulpan Harahap No.Bidang 67 SHM No.00572
66	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0271	7.481,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00011	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	3.014.235.450,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Yohanes Wendy Tjioe No.Bidang 7
67	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0272	1.707,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.03.03.4.00023	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	176.288.052,96	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Heryani No.Bidang 102 Reg No.31/BU/2016

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
68	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0273	271,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	345.412.336,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Andy Sulistio No.Bidang 50 SHM No.00544
69	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0274	1.939,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00005	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	249.287.436,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Asbanir No.Bidang 41
70	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0275	3.030,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00008	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	389.086.036,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Hok Hie No.Bidang 36
71	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0276	32,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00013	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	9.209.035,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Yosse Adrian No.Bidang 115
72	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0277	267,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	646.966.588,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Rully Perlindo No.Bidang 59 SHM No.00359
73	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0279	1.104,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.03.03.4.00023	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	120.921.402,96	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	17488/SP2D/1.03.01.01/2021
74	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0280	2.052,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.468.905.836,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Andy Sulistio No.Bidang 52 SHM No.00550
75	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0281	300,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	215.458.929,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Yuni Alvia Siregar No Bidang 51 SHM No.00543
76	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0282	1.162,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.03.03.4.00023	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	115.024.792,96	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Maziah No.Bidang 103 Reg
77	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0283	926,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00011	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	662.785.450,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Eric Sulendra No.Bidang 5
78	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0284	213,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	14-Apr-22	32.01.08.05.4.00006	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	126.710.067,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Minda Suriyanti No.Bidang 76 SHM No.00362
79	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0285	186,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	110.220.583,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Durminta Pitriawaty Br Tampubolon No Bidang 66 SHM No.00346
80	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0286	4.921,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00011	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.960.175.071,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Yohanes Wendy Tjioe No.Bidang 8
81	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0288	122,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	14-Apr-22	32.01.08.05.4.00006	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	411.942.593,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Usaha An.Pihdi No.Bidang 79 SHM No.00356
82	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0289	9.504,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00011	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.228.141.581,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Hartono No.Bidang 12 SHM No.901
83	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0290	295,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	185.443.270,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Sunardi No.Bidang 60 SHM No.00352
84	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0291	321,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	251.367.721,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Sunardi No.Bidang 60 SHM No.00352
85	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0293	42.396,00	2021	Batam	Hak Pakai	8 Juni 2022 8 Juni 2022	00074 (29.380m2) 00075 (13.016 m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	523.226.823,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Batam	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT. JAYA INDUSTRI MAKMUR No. Bidang 2
86	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0294	122.689,00	2021	Kelurahan Ngenang, Kota Batam	Hak Pakai	8-Jun-22	00076 (122.689m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	723.421.823,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Batam	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT. JAYA INDUSTRI MAKMUR
87	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0296	1.024,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00013	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	492.877.935,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Abdul Rachman Julianto No Bidang 118 SHM No.00855
88	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0297	1.609,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00013	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	773.980.835,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Abdul Rachman Julianto No Bidang 119 SHM No.00855
89	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0306	1.548,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.06.04.4.00003	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	216.235.235,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Muthia Rasyiahana No.Bidang 122
90	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0307	38.049,00	2021	Kelurahan Ngenang, Kota Batam	Hak Pakai	8-Jun-22	00077 (38.049m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	658.138.823,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Batam	KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI - Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT.TEMBESI JAYA MAKMUR

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
91	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0309	784,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00009	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	110.131.713,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Eko Purwanto No Bidang 27 SHM No.00819
92	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0310	861,00	2021	Jalan Indun Suri Kelurahan Tanjung Permai Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	12-Jul-22	32.01.08.05.4.00024	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	86.599.355,96	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An. Effendi Hidayat No. Bidang 22 Sertifikat Hak Milik No. 00482
93	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0311	18,00	2021	Tanjung Uban, Bintan Kepulauan Riau	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00010	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	16.072.731,46	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
94	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0312	282,00	2021	Tanjung Uban, Bintan Kepulauan Riau	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00010	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	187.487.931,46	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
95	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0313	422,00	2021	Tanjung Uban, Bintan Kepulauan Riau	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00010	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	93.795.331,46	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
96	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0314	1.784,00	2021	Tanjung Uban, Bintan Kepulauan Riau	Hak Pakai	12-Jul-22	32.01.08.05.4.00024	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	318.196.110,78	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
97	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0315	580,00	2021	Tanjung Uban, Bintan Kepulauan Riau	Hak Pakai	12-Jul-22	32.01.08.05.4.00024	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	106.496.263,14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
98	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0317	217,00	2021	Tanjung Uban, Bintan Kepulauan Riau	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.08.05.4.00020	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	43.198.813,96	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
99	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0319	4.164,00	2021	Tanjung Uban, Bintan Kepulauan Riau	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00013	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	2.139.411.403,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
100	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0320	261,00	2021	Tanjung Uban, Bintan Kepulauan Riau	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.083.446.850,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
101	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0321	2.697,00	2021	Tanjung Uban, Bintan Kepulauan Riau	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.03.03.4.00023	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	255.294.634,48	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
102	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0322	9.578,00	2021	Tanjung Uban, Bintan Kepulauan Riau	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.03.03.4.00023	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	878.427.494,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
103	Tanah Bangunan Terminal Laut	1.3.1.01.00 1.002.008	0001	2.206,00	2017	Pelabuhan Bongkar Muat Kota Segara Mentigi, Tanjung Uban, Bintan-Kepulauan Riau	Hak Pakai	4-Dec-19	32.01.03.01.4. 00195	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.611.374.367,00	Dinas Perhubungan	Bintan	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA PELABUHAN BONGKAR MUAT TANJUNG UBAN
104	Tanah Bangunan Terminal Laut	1.3.1.01.00 1.002.008	0002	5.548,00	2017	Pelabuhan Bongkar Muat Kota Segara Mentigi, Tanjung Uban, Bintan-Kepulauan Riau	Hak Pakai	6-Dec-19	32.01.03.01.4. 00196	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	797.279.367,00	Dinas Perhubungan	Bintan	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA PELABUHAN BONGKAR MUAT TANJUNG UBAN
105	Tanah Bangunan Terminal Laut	1.3.1.01.00 1.002.008	0003	2.608,00	2019	Pelabuhan Bongkar Muat Kota Segara Mentigi, Tanjung Uban, Bintan-Kepulauan Riau	Hak Pakai	6-Sep-21	32.01.03.01.4.00236	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	830.523.366,00	Dinas Perhubungan	Bintan	Pengadaan tanah untuk pelabuhan bongkar muat tanjung uban Pelabuhan Bongkar Muat
106	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0010	18.030,00	2017	Tebing	Hak Pakai	20-Sep-17	32.03.05.01.4.0092	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	3.811.542.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 5 Karimun
107	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	58.453,00	1979	Jl. Sutan Sulaiman, Tanjungpinang	Hak Pakai	20-Oct-22	32.05.02.02.4.00070 (57.900 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	64.397.300,00	Dinas Pendidikan	Tanjungpinang	SMKN 3 Tanjungpinang
108	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.400,00	1999	JALAN PENDIDIKAN LAYANG KOBEL	Hak Pakai	22-Sep-22	23.03.08.03.4.00010	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	1.122.000.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 4 KUNDUR SAWANG
109	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	12.898,20	1999	JALAN PULAU PASUNG	Hak Pakai	19-Sep-22	32.03.11.02.4.00001	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	77.389.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 5 KUNDUR
110	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.800,00	1999	JALAN MANUNGGAL BUKIT RANGGAM	Hak Pakai	12-Nov-19	32,03,12,03,4,00001	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	166.400.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 6 KUNDUR
111	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	16.000,00	1999	JALAN BESAR SAWANG	Hak Pakai	30 Juni 2020 16 Juni 2019	32.00006 (134 m2), 00005 (12.880m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	176.000.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMKN KUNDUR

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
112	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	10.000,00	2005	Jl.Raja Ali Haji, Desa Sungai Harapan, Kec Singkep Barat Kab.Lingga	Hak Pakai	20-Sep-22	32.06.05.08.4.00009 (44100m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	537.640.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 1 SINGKEP BARAT
113	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	11.250,00	2011	Jl.Sungai Tumu RT.08/RW.04, Desa Penuba, Kec.Selayar, Kab.Lingga	Hak Pakai	20-Sep-22	32.06.09.02.4.00094 (22800m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	386.629.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 3 LINGGA (SMAN 3 Penuba)
114	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	13.832,00	2012	Dus II Mulyasari Desa Bukit Langkap	Hak Pakai	11-Jun-24	32060000001640 (30590m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	42.845.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMKN 1 LINGGA
115	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0004	4.300,00	2013	Dus II Mulyasari Desa Bukit Langkap	Hak Pakai	11-Jun-24	32060000001640 (30590m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	5.777.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMKN 1 LINGGA
116	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	8.783,00	2014	Jl.Batin Encik Muhammad Saleh RT.03/RW.05, Desa Sungai Pinang, Kec.Lingga Timur Kab.Lingga	Hak Pakai	23-Dec-19	32.06.08.05.4.00015 (8783 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	339.511.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 2 LINGGA sekarang berubah menjadi SMAN 1 Lingga Timur
117	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	17.401,00	2016	Jl. Kukang Desa Duara, Kecamatan Lingga Utara	Hak Pakai	21-Sep-22	32.06.04.03.4.00379 (15190m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	40.000.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 1 LINGGA UTARA
118	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	14.148,00	2008	Jln. Jankang Hijau, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep	Hak Pakai	11-Jun-24	NIBEL 32060000001680 (14000m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	403.897.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMKN 1 SINGKEP
119	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	37.500,00	2012	Dus II Mulyasari Desa Bukit Langkap	Hak Pakai	11-Jun-24	32060000001640 (30590m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	60.695.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMKN 1 LINGGA
120	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	1.030,00	2016	Jl.Benan Dusun I RT 001/RW 001 Desa Benan Kec.Senayang	Hak Pakai	22-Dec-19	32.06.11.01.4.00211 (1030 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	196.580.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 2 SENAYANG/Perpustakaan nya saja sekarang namanya SMAN 1 Katang Bidare
121	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	30.000,00	2008	Jl. Raja Ali Haji, Kec. Singkep Barat	Hak Pakai	20-Sep-22	32.06.05.08.4.00009 (44100m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	136.023.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 1 SINGKEP BARAT
122	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0003	8.360,00	2012	Dus II Mulyasari Desa Bukit Langkap	Hak Pakai	11-Jun-24	32060000001640 (30590m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	34.693.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMKN 1 LINGGA
123	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	17.667,00	2008	Pulau Sebangka, Kec. Senayang	Hak Pakai	11-Jun-24	NIBEL 32060000001780 (29160 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	968.625.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMKN 001 SENAYANG
124	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	14.750,00	2011	Jl.Sungai Tumu RT.08/RW.04, Desa Penuba, Kec.Selayar, Kab.Lingga	Hak Pakai	20-Sep-22	32.06.09.02.4.00094 (22800m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	514.805.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 3 LINGGA SELAYAR
125	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	12.083,00	2008	Jl. Pelajar No. 04, Dabo Singkep, Kec. Singkep	Hak Pakai	15-Dec-24	NIB 32.06.000003716.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	732.059.000,0000	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 1 Singkep
126	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	5.342,00	2011	Jl.Benan Dusun I RT 001/RW 001 Desa Benan Kec.Senayang	Hak Pakai	22-Dec-19	32.06.11.01.4.00212 (5342 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	1.008.662.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 002 SENAYANG/ bangunan sekolahnya sekarang namanya SMAN 1 Katang Bidare
127	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	19.340,00	2008	Jl. Istana Robat, Kelurahan Daik, Kecamatan Lingga	Hak Pakai	4 May 2202 27 May 2022	32.06.02.01.4.00050 (631 M2) 32.06.02.01.4.00051 (9530 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	4.564.303.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 1 LINGGA
128	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	30.000,00	2008	Jl. Samudra, Kp. Baru Senayang. Kec. Senayang	Hak Pakai	23-Dec-19	32.06.03.01.4.00285 (632 M2) NIBEL 32060000001760 (5595 M2) NIBEL 32060000001770 (9912 m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	780.000.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 001 SENAYANG HARUSNYA 2 BIDANG KARENA SEKOLAH DAN RUMAH DINAS TERPISAH CUKUP JAUH

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
129	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	15.418,00	2010	Jl. Gudang Tengah RT 01/RW II Rintis, Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten kepulauan Anambas	Hak Pakai	23-Sep-22	32.07.01.03.4.00029 (6416m2) 32.07.01.03.4.00030 (2200m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	253.680.000,00	Dinas Pendidikan	Anambas	SMAN 1 Siantan
130	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	7.695,00	2013	Jl. H. Ali No.38 Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah	Hak Pakai	22-Sep-22	32.07.07.01.4.00178 (8318m2	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	100.000.000,00	Dinas Pendidikan	Anambas	SMKN 1 Anambas
131	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	3.115,00	2017	Jl. Patimura Pering-Bandarsyah, Ranai, Indonesia	Hak Pakai	5-Apr-08	32.04.01.08.4.00005 (3.115 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	358.054.067,14	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 2 Bunguran Timur
132	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0001	416,00	2006	Jl. Sumatera, Tanjungpinang	Hak Pakai	23-Sep-11	32.05.01.01.4.00069 (416 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	873.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Tanjungpinang	KANTOR UPT BADAN PP JAL RIAU
133	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0001	465,00	2006	Jl. Sumatera, Tanjungpinang	Hak Pakai	23-Sep-11	Nomor 32. 05.01,01.4.00070 (465.M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	880.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Tanjungpinang	KANTOR UPT BADAN PP JAL RIAU
134	Tanah Bangunan Bangunan Pembibitan	1.3.1.01.00 1.004.013	0002	300.000,00	2008	Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun	Hak Pakai	19-Sep-22	32.03.08.02.4.00006	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.200.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	Karimun	Tanah pembibitan Sawang
135	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1.3.1.01.00 1.001.004	0001	12.336,00	2005	Jln. Hang Tuah	Hak Pakai	4-Mar-20	32.05.01.01.4.00138 (12.336 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	6.090.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Gedung Daerah
136	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0039	30.058,00	2005	Jln. D.I Panjaitan	Hak Pakai	5-Apr-83	1694/83/594,3/TPI (20.000 m2) 04.53.03.04.4.00025 (10.058 m2)	Balai Latihan Kerja Industri Pertanian Dirjen Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja di Tanjungpinang dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	125.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU
137	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	1.3.1.01.00 1.004.004	0001	2.550,00	2006	Pulau Penyengat Tanjungpinang	Hak Pakai	4-Mar-19	32.05.01.02.4.00003 (2.550 m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	1.275.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	penyengat
138	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	449,00	2006	Jl. Kijang Tg Pinang	Hak Pakai	4-Dec-19	32.01.01.03.4. 00005	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	170.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Bintan	Mako Pulhut
139	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0004	788,00	2006	Jlan Sulaiman <Riau	Hak Pakai	7-Sep-22	32.05.03.01.4.00199 (724 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	1.576.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Ex Kantor Perikanan Jln Sulaiman, Jln Riau.
140	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0005	1.332,00	2006	Jl. St. Mahmud No. 13 Tanjungpinang	Hak Pakai	8-Sep-22	32.05.04.02.4.00302 (M 1.277 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	1.998.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Upt Perikanan ,Labour
141	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0006	1.820,00	2006	Jl. Tugu Pahlawan TPI	Hak Pakai	22-Mar-21	32.05.03.01.1.00156 (1.820m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	6.915.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tanjungpinang	Kantor BPBD
142	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0009	4.521,00	2006	Jl. Desa Kawal	Hak Pakai	9-Dec-19	32.01.0501..4. 00081	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	1.250.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Bintan	KAWAL 5 UNIT RUMAH DINAS
143	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0010	894,00	2006	Jl. Desa Gunung Kijang, Kawal	Hak Pakai	30-Dec-19	32.01.05.01.4.00084	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	175.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Bintan	TANAH BANGUNAN PAUD
144	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0011	640,00	2006	Jl. Desa Kawal	Hak Pakai	4-Dec-19	32.01.05.01.4.00080	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	437.500.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Bintan	KAWAL TK TUNAS MUDA
145	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0014	6.873,00	2006	Jl. Pemuda, Tanjungpinang	Hak Pakai	7-Sep-22	32.05.04.03.4.00153	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	3.582.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Asrama Haji Tanjungpinang
146	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0017	3.153,00	2006	Jl. Sunaryo Batu 4 kel Tg Batu Barat	Hak Pakai	19-Sep-22	32.03.02.01.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	1.418.850.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Karimun	Rumah dinas jalan sunaryo
147	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0018	465,00	2006	Jl. Desa Tg.Batu Kec.Kundur	Hak Pakai	19-Sep-22	32.03.02.02.4.00075	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	1.576.500.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Karimun	Rumah dinas jalan sudirman

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
148	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0020	7.562,00	2006	Jl. Yakkop, Kelurahan Air Mali, Kecamatan Bunguran Utara-Natuna	Hak Pakai	14-Feb-22	32.04.09.03.4.00069 (7.562 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	4.500.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Natuna	TANAH BANGUNAN KEL AIR MALI BUNGURAN UTARA
149	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0021	4.571,00	2006	Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur - Natuna	Hak Pakai	18-Mar-22	32.04.01.09.4.00007 (4.571.M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	1.188.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Natuna	TANAH BANGUNAN KANTOR JALAN YOSUDARSO BATU HITAM
150	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0023	4.510,00	2006	Jl. Desa Jemaja Kec.Jemaja	Hak Pakai	22-Sep-22	32.07.06.08.4.00224 (4246m2	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	789.250.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Anambas	
151	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0024	500,00	2006	Jl.Kobat	Hak Pakai	20-Sep-22	32.06.02.01.4.00079 (550 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	125.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Lingga	RUMAH DINAS JALAN KOBAT/Alih Media
152	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0032	1.200,00	2006	Jl. Bukit Cengkeh	Hak Pakai	20-Sep-22	32.06.02.01.4.00080 (1418 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	180.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Lingga	TANAH BANGUNAN KANTOR
153	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0033	1.200,00	2006	Jl. Kartini	Hak Pakai	20-Sep-22	32.06.01.01.4.00264 (2466 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	180.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Lingga	RUMAH DINASJALAN KARTINI SINGKEP
154	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0034	4.492,00	2006	Dompak Seberang Tanjung Pinang	Hak Pakai	19-Jun-19	32.05.04.05.4.0030 (4.492 m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	15.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Upt Perikanan Sebelah Pelabuhan Roro
155	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0169	8.612,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P3	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	37.462.200,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
156	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0174	19.789,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P13	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00071	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	65.303.700,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 1
157	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0175	2.488,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P14	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00071	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	8.210.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 1
158	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0176	14.361,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P15	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	57.444.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
159	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0177	9.730,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P16	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	48.650.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
160	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0181	39.196,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P20	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	137.186.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
161	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0182	38.299,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P21	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	172.345.500,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
162	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0184	25.946,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P23	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	106.378.600,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
163	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0185	14.982,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P25	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	63.673.500,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
164	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0186	7.920,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P26	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	33.660.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
165	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0187	12.867,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P27	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	54.684.750,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
166	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0188	5.684,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P28	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	24.157.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
167	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0189	4.276,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P29	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	18.173.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
168	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0190	5.622,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P30	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	18.693.500,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
169	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0191	14.111,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P31	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	59.971.750,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
170	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0192	11.956,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P32	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	50.813.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
171	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0193	8.129,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P33	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	34.548.250,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
172	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0194	20.012,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P34	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	80.048.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
173	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0195	69.196,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P35	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	276.784.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
174	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0196	5.506,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P36	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	16.518.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
175	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0197	122.697,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P37	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	487.298.250,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
176	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0198	9.981,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P38	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	42.918.300,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
177	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0199	32.130,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P39	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	106.029.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
178	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0200	54.163,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P40	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	178.737.900,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
179	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0203	72.454,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P44	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	304.306.800,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
180	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0206	11.399,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P48	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	34.766.950,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
181	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0207	73.591,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P49	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	240.483.550,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
182	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0208	21.514,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P50	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	86.056.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
183	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0209	26.385,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P51	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	9.099.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
184	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0210	17.008,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P52	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	68.032.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
185	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0220	4.002,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P62	Hak Pakai	16-Dec-20	32.05.04.05.4.00052	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	16.008.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
186	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0222	9.400,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P64	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	37.600.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
187	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0223	10.116,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P65	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	40.464.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
188	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0224	19.905,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P66	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	59.715.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
189	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0225	9.965,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P67	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	39.860.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
190	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0227	14.357,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P69	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	68.928.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
191	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0229	16.385,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P71	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	52.655.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
192	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0231	7.697,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P73	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	7.151.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
193	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0232	2.246,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P74	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	6.738.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
194	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0233	19.134,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P75	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	75.395.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
195	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0235	18.057,50	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P77	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	54.439.410,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
196	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0236	12.006,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P78	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	36.018.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
197	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0237	7.959,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P79	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	23.877.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
198	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0238	18.646,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P80	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	59.938.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
199	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0239	77.560,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P81	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	271.460.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
200	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0240	16.340,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P82	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	71.320.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
201	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0241	6.483,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P83	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	24.414.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
202	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0242	58.566,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P84	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	292.830.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
203	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0243	12.023,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P85	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	36.069.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
204	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0244	9.451,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P86	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	28.353.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
205	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0245	10.801,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P87	Hak Pakai	16-Dec-20	32.05.04.05.4.00052	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	43.204.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
206	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0246	62.602,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P88	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	262.908.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
207	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0249	6.242,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P92	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	9.955.807,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
208	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0250	30.820,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P93	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	61.448.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
209	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0251	14.046,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P94	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	64.034.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
210	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0252	20.028,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P95	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	80.112.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
211	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0253	14.791,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P96	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	59.164.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
212	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0253	10.832,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P97	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	12.552.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
213	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0254	19.375,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P98	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	87.642.132,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
214	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0255	9.432,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P99	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	28.296.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
215	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0101	25.318,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P 220	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073 NIB. 32.05.000001797.0 (13 Nov 24)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	113.272.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
216	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0100	2.504,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P 221	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	7.512.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
217	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0099	17.655,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P 266	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	141.807.440,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
218	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	15.459,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P 267	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	98.629.060,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
219	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	15.552,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P 268	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	101.722.030,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
220	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0104	141.490,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P 269	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021 / 32.05.04.05.4.00036	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	4.167.067.069,60	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
221	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0102	199.382,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P 270	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021 / 32.05.04.05.4.00036	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	9.324.487.056,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
222	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0256	9.896,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P100	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	29.688.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
223	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0257	13.403,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P101	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	60.696.719,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
224	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0258	26.276,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P102	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	132.612.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
225	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0259	108.985,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P103	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	792.233.603,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
226	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0260	21.225,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P104	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	63.675.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
227	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0262	4.498,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P106	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	13.494.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
228	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0263	20.073,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P107	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	60.219.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
229	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0264	7.795,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P108	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	45.090.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
230	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0265	10.925,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P109	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	32.775.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
231	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0266	2.314,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P110	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	6.942.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
232	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0267	26.184,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P111	Hak Pakai	16-Dec-20	32.05.04.05.4.00052	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	112.471.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
233	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0269	11.537,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P113	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	34.611.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
234	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0270	11.638,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P114	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	46.552.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
235	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0271	12.570,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P115	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	48.680.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
236	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0272	8.345,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P116	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	31.035.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
237	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0273	21.999,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P117	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	117.475.020,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
238	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0274	28.921,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P118	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	162.860.500,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
239	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0278	15.752,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P122	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	70.093.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
240	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0279	9.416,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P123	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	38.774.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
241	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0281	19.482,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P125	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	82.098.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
242	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0309	8.006,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P126	Hak Pakai	16-Dec-20	32.05.04.05.4.00052	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	24.018.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
243	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0282	18.180,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P127	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	72.720.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
244	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0284	27.494,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P129	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	66.083.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
245	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0288	10.257,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P133	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	30.771.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
246	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0289	15.644,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P134	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073 + blok 14	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	73.619.500,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
247	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0291	8.454,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P136	Hak Pakai	16-Dec-20	32.05.04.05.4.00052	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	42.955.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
248	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0293	26.721,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P138	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	87.621.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
249	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0294	12.877,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P139	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	51.508.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
250	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0295	19.998,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P140	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021 + Sisa Persil	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	75.349.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
251	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0296	16.916,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P141	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	91.992.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
252	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0298	58.086,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P143	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	337.432.864,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
253	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0299	210.604,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P144	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	884.480.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
254	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0303	6.253,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P148	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	25.012.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
255	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0306	542.148,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P151	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.076.140.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
256	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0307	509.923,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P152	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021 / 32.05.04.05.4.00036	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	2.037.061.736,74	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
257	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0308	20.968,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P153	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	62.904.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
258	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	3.631,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P154	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	10.893.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
259	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	40.911,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P155	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	122.733.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
260	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	12.314,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P156	Hak Pakai	08/11/2017 23/09/2022	32.05.04.05.4.00021 32.05.04.05.4.00068	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	49.256.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 10
261	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0311	27.475,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P158	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	127.785.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
262	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0312	9.364,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P159	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	55.681.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
263	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0313	10.371,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P160	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	41.484.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
264	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0314	19.230,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P161	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	94.387.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
265	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0317	119.672,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P164	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	528.919.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
266	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0319	9.927,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P166	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	39.708.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
267	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0321	6.249,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P168	Hak Pakai	16-Dec-20	32.05.04.05.4.00052	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	24.996.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
268	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0322	8.010,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P169	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	41.719.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
269	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0323	61.162,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P170	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	235.098.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
270	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0327	4.337,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P176	Hak Pakai	16-Dec-20	32.05.04.05.4.00052	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	28.879.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
271	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0328	1.340,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P177	Hak Pakai	29-Sep-22	32.05.04.05.4.00072	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	4.020.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 2
272	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0330	18.886,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P179	Hak Pakai	12/16/2020 23/09/2022	32.05.04.05.4.00052 32.05.04.05.4.00068	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	61.304.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 10
273	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0331	17.172,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P180	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	62.716.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
274	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0333	15.587,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P182	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	63.468.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
275	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0339	32.584,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P188	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	33.516.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
276	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0341	9.871,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P190	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	39.484.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
277	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0346	5.114,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P195	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	20.456.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
278	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0347	10.671,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P196	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	30.388.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
279	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0348	11.660,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P197	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	57.972.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
280	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0349	9.117,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P198	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	37.708.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
281	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0353	80.636,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P202	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	303.947.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
282	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0357	6.450,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P206	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	29.590.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
283	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0358	25.639,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P207	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	193.521.500,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
284	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0360	7.137,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P209	Hak Pakai	29-Sep-22	32.05.04.05.4.00072	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	290.395.990,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 2
285	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0361	5.399,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P210	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	17.202.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
286	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0362	102.696,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P211	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	476.291.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
287	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0363	5.553,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P212	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	16.659.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
288	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0364	11.136,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P213	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	44.578.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
289	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0367	3.258,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P216	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	86.917.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
290	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0369	12.355,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P218	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	168.928.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
291	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0079	42.781,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P222	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	201.280.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
292	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0078	15.802,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P223	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	63.208.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
293	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0069	25.931,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P225	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	96.545.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
294	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0070	6.959,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P232	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	27.836.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
295	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0067	3.682,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P233	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	14.728.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
296	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0065	6.928,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P237	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	29.964.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
297	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0064	4.728,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P239	Hak Pakai	29-Sep-22	32.05.04.05.4.00072	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	280.578.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 2
298	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0058	4.357,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P241	Hak Pakai	29-Sep-22	32.05.04.05.4.00072	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	90.386.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 2
299	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0042	2.942,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P245	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	8.826.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
300	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0056	9.389,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P246	Hak Pakai	29-Sep-22	32.05.04.05.4.00072	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	199.861.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 2
301	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0044	9.937,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P248	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	93.833.770,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
302	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0047	6.664,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P251	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	19.992.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
303	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0049	1.195,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P253	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	84.217.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
304	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0052	2.917,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P256	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	8.751.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
305	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0053	50.380,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P257	Hak Pakai	16-Dec-20	32.05.04.05.4.00052	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	151.140.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
306	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0055	15.759,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P259	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	81.991.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
307	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0114	10.021,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P260	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	30.063.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 7
308	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0115	14.802,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P261	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	44.406.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
309	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0113	16.648,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P262	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021 NIB. 32.05.000003025.0 (13 Nov 24)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	49.944.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
310	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0116	10.088,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P263	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	49.836.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
311	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0111	15.072,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P265	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	75.339.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
312	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0095	12.567,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P271	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	76.071.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
313	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0094	25.601,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P272	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	154.969.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
314	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0131	78.240,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P287	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.669.686.312,48	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
315	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0140	19.379,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P295	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00069 NIB. 32.05.000001796.0 (12 Nov 24)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	110.535.700,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 16
316	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0144	6.219,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P298	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00069	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	24.876.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 16
317	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0150	9.674,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P304	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	35.864.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
318	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0158	18.876,00	2011	Tanah Perkantoran / Dompak persil P312	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	107.990.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
319	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0159	29.733,00	2011	Tanah Perkantoran / Dompak persil P313	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	188.466.500,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
320	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0161	18.838,00	2011	Tanah Perkantoran / Dompak persil P315	Hak Pakai	29-Sep-22	32.05.04.05.4.00072	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	224.536.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 2
321	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1.3.1.01.00 1.001.005	0001	3.000,00	2007	Jl..Nitikan Desa Sorosutan Kec,Umbul Harjo Yogyakarta	Hak Pakai	6-May-18	Nomor 13.05.13.06.4.00144, (M 2.231 M2) Nomor 13.05.13.06.4.00141 (770 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	2.700.900.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Yogyakarta	ASRAMA SISWA
322	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	30.680,00	2009	Pulau Berhala, Lingga	Hak Pakai	24-Mar-10	21.04.01.06.4.00005 (30.680 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	705.640.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Lingga	TANAH
323	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	17.310,00	2009	P.Berhala	Hak Pakai	24-Mar-10	21.04.01.06.4.00006 (17.310 m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	398.130.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Lingga	TANAH
324	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0005	4.643,00	2009	jl.bangau sakti desa simp.baru kec. tampan pekanbaru	Hak Pakai	15-Nov-10	Nomor 05.01.08.01.1.00022 (4.643 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	928.600.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Pekanbaru	ASRAMA SISWA
325	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0003	590,00	2011	jl.cikutra kel. neglasari cibeunying kaler bandung 1	Hak Pakai	21-Feb-13	Nomor10.15.18.03.4.00020 (590 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	949.369.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Bandung	ASRAMA SISWA
326	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0004	200,00	2011	jl.cikutra kel.neglasari cibeunying kaler bandung 2	Hak Pakai	21-Feb-13	Nomor10.15.18.03.4.00019 (200 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	308.947.200,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Bandung	ASRAMA SISWA
327	Tanah Bangunan Rumah Sakit	1.3.1.01.00 1.004.003	0001	50.000,00	2007	Jl. WR. Supratman, Tanjungpinang	Hak Pakai	22-Mar-21	32.05.02.04.4.00138 (50.000 m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	6.496.920.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	RSUP Raja Ahmad Thabib
328	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0003	1.374,00	2006	Jl. Hangtuah No. 13 Tanjungpinang	Hak Pakai	23-Sep-11	32.05.01.02.4 00748	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	735.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	angunan gedungEx Kehutanan jalan Hang Tua
329	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0008	222,00	2006	Jl. Desa Telaga Pungkur Kel. Kabil	Hak Pakai	3-Jan-22	32.02.05.03.4.00030/Kabil	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	637.500.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Batam	
330	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0012	720,00	2006	Pulau Buluh	Hak Pakai	20-Sep-21	32.02.08.02.4.r00117	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	108.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Batam	samping kantor camat
331	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0014	164,00	2006	Jl. Zakaria Ahmad depan SD Pulau Buluh	Hak Pakai	20-Sep-21	32.02.08.02.4.00116	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	24.666.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Batam	
332	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0015	513,00	2006	Pulau Buluh	Hak Pakai	20-Sep-21	32.02.08.02.4.00118	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	210.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Batam	samping masjid

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
333	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0027	54,87	2006	Jl. Tanjung batu	Hak Pakai	19-Sep-22	32.03.02.02.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	27.435.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Karimun	Rumah dinas jalan Sudirman
334	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0028	214,95	2006	Jl. Moro Karimun	Hak Pakai	19-Sep-22	32.03.01.01.4.00076	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	85.980.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Karimun	Tanh bangunan rumah dinas (lapangan Volly)
335	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0030	935,00	2006	Jl. Tanjung Balai Karimun	Hak Pakai	20-Sep-22	32.03.03.07.4.00027	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	607.750.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Karimun	Tanah Bangunan Rumah Dinan (dipakai UPT Perikanan Pemprov)
336	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0031	315,00	2006	Jl. Tanjung Balai Karimun	Hak Pakai	19-Sep-22	32.03.03.07.4.00128	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	204.750.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Karimun	Tanah bangunan kantor upt disnaker
337	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0032	38,06	2006	Jl. Tanjung Batu	Hak Pakai	19-Sep-22	32.03.02.02.4.00074	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	13.321.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Karimun	Tanh bangunan kantor jalan Ahmad yani
338	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0033	330,28	2006	Jl. Penuba Kepri	Hak Pakai	21-Sep-22	32.06.09.02.4.00095 (1114 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	107.339.600,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Lingga	Rumah dinas penuba
339	Tanah Kebun Induk	1.3.1.01.00 2.003.002	0001	20.000,00	2006	Jl. Desa Gesek	Hak Pakai	27-12-2019 23-09-2022	Nomor 32.01.09.04.00047 Nomor 32.01.09.04.00051	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	3.000.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Bintan	PDAM Tirta Kepri
340	Tanah Kebun Induk	1.3.1.01.00 2.003.002	0002	5.201,00	2006	Jl. Kelapa Hybrida Gesek	Hak Pakai	23-Sep-22	00030 00031 00032	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	250.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Bintan	Puskeswan
341	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.3.1.01.00 2.002.002	0002	4.600,00	2006	Pulau Penyengat Tanjungpinang	Hak Pakai	4-Mar-19	32.05.01.02.4. 00015 (4.600 M 2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	2.300.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
342	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.3.1.01.00 2.002.002	0003	1.000,00	2006	Jl. Moro	Hak Pakai	19-Sep-22	32.03.01.01.4.00077	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	225.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Karimun	Tanah Bangunan Perumahan (lapangan Volly)
343	Tanah Untuk Jembatan	1.3.1.01.00 3.007.010	0001	2.235,00	2006	Bt 6 Tanjungpinang	Hak Pakai	4-Mar-19	32.05.02.02.4.00019 (2.235 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	HIbah	8.381.250.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Jembatan timbang
344	Tanah Bangunan Kandang Hewan	1.3.1.01.00 1.004.012	0001	4.603,00	2006	Tanah Selat Bintan II, Pengujan, Teluk Bintan, Bintan 4.603 m2 (Pembangunan Hatchery)	Hak Pakai	23-Sep-22	32.01.06.04.4.00003	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	127.963.400,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Bintan	
345	Tanah Untuk Bangunan Pabrik Es	1.3.1.01.00 1.003.023	0001	50.500,00	2021	Jl. Pelabuhan Perikanan No. 01 RW. 01 RT. 01 Kel. Tarempa Timur Kec. Siantan Kab. Kepulauan Anambas	Hak Pengelo	26-Nov-13	Nomor 00001	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pemerintah	707.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Anambas	UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Anatang
346	Tanah Kampung	1.3.1.01.00 3.017.001	0001	64.489,00	2009	Pulau Penyengat Tanjungpinang	Hak Pakai	5-May-07	32.05.02.02.4.00011 (64.489 m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	2.579.000.000,00	Dinas Pariwisata	Tanjungpinang	Penyengat
347	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	1.855,00	2002	Jl. Kijang Lama (SLBN 1 Tanjungpinang)	Hak Pakai	7-Nov-22	32.05.02.03.4.00178 (2.714 M2)32.05.02.03.4.00177 (395 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	188.282.500,00	Dinas Pendidikan	Tanjungpinang	SLBN 1 Tanjungpinang
348	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	9.022,00	1988	Jalan Basuki Rahmat	Hak Pakai	7-Sep-22	32.05.04.03.4.00152	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	891.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Kantor UPTD Tanjungpinang
349	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	480,00	1980	Jl. Permaisuri, Pertokoan Anra Wika Square Blok A No. 1, Tanjung Uban - Bintan	Hak Pakai	31-Dec-21	32.01.03.01.4.00240	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	923.325.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Bintan	KPPD Bintan
350	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0002	52,00	1988	Jl. Permaisuri, Pertokoan Anra Wika Square Blok A No. 1, Tanjung Uban - Bintan	Hak Pakai	31-Dec-21	32.01.03.01.4.00239	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	128.971.490,00	Badan Pendapatan Daerah	Bintan	KPPD Bintan

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
351	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0327	102,00	17-May-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.08.05.4.00023	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	334.748.076,95	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
352	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0328	501,00	17-May-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	30-Jan-18	32.01.08.05.4.00034	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	240.472.300,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
353	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0329	569,00	17-May-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.08.05.4.00019	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	73.392.846,96	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
354	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0330	30,00	17-May-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.08.05.4.00022	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	8.272.046,95	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
355	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0331	226,00	17-May-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.08.05.4.00022	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	34.927.246,95	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
356	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0336	1.145,00	24-May-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.08.05.4.00016	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	159.107.346,96	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
357	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0337	209,00	24-May-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.08.05.4.00018	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	30.604.255,95	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
358	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0338	605,00	24-May-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.08.05.4.00017	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	221.204.846,96	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
359	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0339	144,00	24-May-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.08.05.4.00018	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	22.371.873,95	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
360	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0340	3.301,00	07-Jun-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	25-Oct-22	32.01.08.05.4.00027	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.057.392.500,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
361	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0341	24.789,00	07-Jun-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	17-Nov-22	32.01.03.01.4.00242	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.006.614.411,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
362	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0342	237,00	12-May-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	8-Jul-22	32.01.08.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	160.114.846,95	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
363	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0343	115,00	18-May-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	8-Jul-22	32.01.08.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	99.844.846,95	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
364	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0344	703,00	12-May-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	8-Jul-22	32.01.08.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	333.894.846,95	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
365	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0345	445,00	12-May-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	23-Dec-22	32.01.08.05.4.00036	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	74.105.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
366	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0346	12.194,00	15-Aug-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	25-Oct-22	32.01.08.05.4.00031	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.299.074.500,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
367	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0349	12.181,00	30-Aug-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	25-Oct-22	32.01.08.05.4.00033	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	691.378.177,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
368	Tanah Bangunan Rumah Sakit	1.3.1.01.00 1.004.003	0001	100.000,00	2006	Jl. Indun Suri, Tanjung Uban - Bintan	Hak Pakai	8-Jun-22	32.01.08.01.4.00007	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	2.540.274.100,00	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	Bintan	RSUP Bintan
369	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0201	11.511,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P41	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00070	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	47.770.650,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 9 BLOK 4
370	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0212	10.574,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P54	Hak Pakai		00074	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	43.617.750,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 11
371	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0226	13.075,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P68	Hak Pakai		00074	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	58.300.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 11
372	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0277	6.365,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P121	Hak Pakai		00075	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	25.460.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 7
373	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0316	199.558,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P163	Hak Pakai		00074	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.042.915.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 11
374	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0332	22.292,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P181	Hak Pakai		00075	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	120.418.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 7
375	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0076	7.820,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P226	Hak Pakai		00075	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	46.479.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 7
376	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0071	10.616,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P231	Hak Pakai		00075	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	49.259.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 7
377	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0048	40.479,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P252	Hak Pakai		00074	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	232.012.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 11
378	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0126	16.082,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P283	Hak Pakai		00075 / '00076	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	73.448.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 7 Blok 8
379	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0130	7.659,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P286	Hak Pakai		00074	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	74.544.280,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 11
380	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0135	16.560,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P288	Hak Pakai		00075	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	113.737.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
381	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0141	16.819,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P296	Hak Pakai		00075	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	87.809.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 7
382	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0143	9.431,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P297	Hak Pakai		00075	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	53.942.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 7
383	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0352	244,00	25-Oct-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	19-Jan-23	32.01.03.03.4.00024	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	21.345.910,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
384	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0355	818,00	25-Oct-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	25-Jan-23	32.01.03.03.4.00025	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	86.723.221,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
385	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0356	171,00	07-Dec-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	25-Jan-23	32.01.08.05.04.00040	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	12.723.474,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
386	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0357	95,00	07-Dec-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	25-Jan-23	32.01.08.05.4.00038	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	8.963.825,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
387	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0358	209,00	07-Dec-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	25-Jan-23	32.01.08.05.4.00037	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	34.753.600,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
388	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0359	142,00	07-Dec-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	25-Jan-23	32.01.08.05.4.00041	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	21.085.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
389	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0360	754,00	07-Dec-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	25-Jan-23	32.01.08.05.4.00039	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	95.854.900,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
390	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0376	2.063,00	23-Mar-22	Jalan Garuda Raya, Lobam Mas Asri Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	25-Oct-22	32.01.08.05.4.00029	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	487.334.017,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Untuk pembangunan jembatan batam-bintan
391	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	27.424,00	2002	Jln. Pemuda, Tanjungpinang	Hak Pakai	13-Dec-22	32.05.04.03.4.00156 (27.424m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	30.771.868,00	Dinas Pendidikan	Tanjungpinang	SMAN 4 Tanjungpinang
392	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	17.950,00	1999	JALAN BESAR SUNGAI UNGGAR KM. 7	Hak Pakai	12-Nov-19	32.03.12.03.4.00001	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	1.077.000.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 3 KUNDUR
393	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	32.972,00	1999	JALAN RAJA OESMAN	Hak Pakai			Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	8.704.608.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 2 KUNDUR
394	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	12.750,00	1999	JALAN SUNARYO	Hak Pakai	8-Mar-00	05.06.05.01.4.0002	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI	Hibah	1.045.500.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 1 KUNDUR
395	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	23.660,00	1999	JALAN HANG TUAH KM. 4	Hak Pakai	11-Nov-24	NIBEL.320300000412 90 (23660m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	957.600.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 2 KUNDUR
396	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	18.928,00	1999	JALAN RAJA HAJI	Hak Pakai	25-Nov-99	05.06.04.03.4.0024	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	529.984.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 1 MORO
397	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	14.378,00	2005	Desa Kampung Hilir. Tambelan		23-Sep-13	32.01.08.03.4.00001	Pemerintah Kabupaten Bintan	Hibah	49.500.000,00	Dinas Pendidikan	Bintan	SMAN 1 Tambelan (P3D)
398	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	12.748,00	2005	JL. RAYA GESEK KM. 23		4-Jul-09	32.01.06.04.00012	Pemerintah Kabupaten Bintan	Hibah	1.274.800.000,00	Dinas Pendidikan	Bintan	SMAN 1 Gunung Kijang
399	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	40.263,00	2023	Desa.Kuala Sempang. Kec. Seri Kuala Lobam. Kab. Bintan	Hak Pakai	23-Sep-13	NIB EL. 32.01.000002651.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	P3D	1.811.835.000,00	Dinas Pendidikan	Bintan	SMK4 Kuala Sempang Lobam
400	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.000,00	1999	JALAN JEND. A. YANI PARIT BENUT	Hak Pakai	11-Jan-07	21.02.0403.4.0004	Pemerintah Kabupaten Karimun	Hibah	2.500.000.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 3 Kundur
401	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1.3.1.01.00 1.001.005	0001	1.998,00	2022	Kel. Pamak Kec. Tebing	Hak Pakai	12-Jun-03	HP.No.01/2003	Pemerintah Kabupaten Karimun	Hibah	119.880.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Karimun	Wisma Transit
402	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	10.034,00	2001	Jl. Pelajar, Sedanau	Hak Pakai	25-Aug-09	32.04.02.01.4.00010	Pemerintah Kabupaten Natuna	Hibah	72.310.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 1 Bunguran Barat
403	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.000,00	2001	Jl. Panglima Hujan, Sedanau					Hibah	1.449.000.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMKN 1 Bunguran Barat

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
404	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.000,00	2001	Jl. Pramuka No.12 Ranai	Hak Pakai	18-Dec-24	NIB. 32.04.000002074.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	2.000.000.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 1 Bunguran Timur
405	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001		2001	Jl. Patimura Pering-Bandarsyah, Ranai, Indonesia	Hak Pakai				Hibah	1.705.000.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 2 Bunguran Timur
406	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	2.146,00	2007	DESA BATU BELANAK KEC. MIDAI	Hak Pakai	12-Feb-08	32.04.05.02.4.00001 (2.146 M2)	Pemerintah Kabupaten Natuna	Hibah	64.380.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 1 Midai
407	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	20.000,00	2007	Kel. Ranai Darat Kec. Bunguran Timur	Hak Pakai	12-Feb-08	32.04.01.08.4.00001 (20.000 M2)	Pemerintah Kabupaten Natuna	Hibah	600.000.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMKN 1 Bunguran Timur
408	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	23.325,00	2007	DESA PULAU TIGA KECAMATAN PULAU TIGA	Hak Pakai	12-Feb-08	32.04.11.02.4.00001 (23325 M2)	Pemerintah Kabupaten Natuna	Hibah	244.912.500,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 01 Pulau Tiga
409	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0003	4.630,00	2007	Jl. Patimura Pering-Bandarsyah, Ranai, Indonesia	Hak Pakai	12-Feb-08	32.04.01.07.4.00003 (4.630 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	532.195.932,86	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 2 Bunguran Timur
410	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	1.808,00	2008	KEL. SEDANAU KEC. BUNGURAN BARAT	Hak Pakai	25-Aug-09	32.04.02.01.4.00010 (1.808 M2)	Pemerintah Kabupaten Natuna	Hibah	90.400.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 1 Bunguran Barat
411	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	3.709,00	2014	SELADING PULAU TIGA	Hak Pakai	12-Feb-08	32.04.11.02.4.00001	Pemerintah Kabupaten Natuna	Hibah	148.360.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 1 Pulau Tiga
412	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	18.300,00	2017	DESA HARAPAN JAYA, KECAMATAN BUNGURAN TENGAH KABUPATEN NATUNA	Hak Pakai	14-Feb-22	32.04.11.02.4.00011 (18.300 M2)	Pemerintah Kabupaten Natuna	Hibah	911.000.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	Sman 1 Bunguran Tengah
413	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	11.883,00	1990	JL.RAYA SEKANAK	Hak Pakai	14-May-09	Nomor 00204	Pemerintah Kota Batam	Hibah	640.493.700,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 2 Batam
414	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	2.041,00	2006	Jl. Teluk Kangkung & Teluk Sunti, Batam	Hak Pakai	5-Aug-09	Nomor 00078	Pemerintah Kota Batam	Hibah	11.225.500,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 13 Batam
415	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0003	15.001,00	2014	Kav. Bukit Kamboja RT 03/ RW:IV Sei Pelunggut Sagulung Batam Kep. Riau	Hak Pakai	23-Jan-14	Nomor 00001	Pemerintah Kota Batam	hibah	216.073.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 5 Batam
416	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	800,00	2009	Jl.Raja Ali Haji No. 1 Kel. Pulau Buluh	Hak Pakai	6-Oct-09	Nomor 00093	Pemerintah Kota Batam	Hibah	28.077.900,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 11 Batam
417	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	838,00	2009	Kelurahan Kasu	Hak Pakai	3-Jun-09	Nomor 00008	Pemerintah Kota Batam	Hibah	9.804.600,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 7 Batam
418	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	10.514,00	2002	Jl. Karya Kampung Baru - Tanjungpinang	Hak Pakai	22-Apr-21	32.05.02.04.4.00137	Pemerintah Kota Tanjungpinang	Hibah	151.619.000,00	Dinas Pendidikan	Tanjungpinang	SMAN 3 Tanjungpinang
419	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	6.979,00	2002	Jln. H. Agus Salim, Tanjungpinang	Hak Pakai	29-Sep-15	00032	Pemerintah Kota Tanjungpinang	Hibah	3.223.767.747,00	Dinas Pendidikan	Tanjungpinang	SMAN 5 Tanjungpinang
420	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	17.470,00	2002	Jl. Pramuka No. 7, Tanjungpinang	Hak Pakai	10-Oct-24	NIB. 32.05.000002519.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	2.665.200.000,00	Dinas Pendidikan	Tanjungpinang	SMKN 1 Tanjungpinang
421	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	16.030,00	2002	Jl. DR. Soetomo, Tanjungpinang	Hak Pakai	5-Feb-24	32.05.03.04.4.00103	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	2.644.950.000,00	Dinas Pendidikan	Tanjungpinang	SMAN 1 Tanjungpinang
422	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	18.520,00	2012	Jl. Basuki Rachmat No 4, Tanjungpinang	Hak Pakai	10-Oct-24	NIB. 32.05.000002520.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	4.954.950.000,00	Dinas Pendidikan	Tanjungpinang	SMAN 2 Tanjungpinang
423	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	4.000,00	2015	Jln. Kp. Sungai Carang (SMAN 7 Tanjungpinang)	Hak Pakai	22-Apr-21	32.05.02.04.4.00136 (10.514M2) 32.05.02.04.4.00137 (6.920 M2)	Pemerintah Kota Tanjungpinang	Hibah	2.137.600.000,00	Dinas Pendidikan	Tanjungpinang	SMAN 7 Tanjungpinang
424	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	54.182,00	2006	Jl. Nusantara Km 15, Tanjungpinang	Hak Pakai	23-Oct-15	00038	Pemerintah Kota Tanjungpinang	Hibah	1.276.367.488,00	Dinas Pendidikan	Tanjungpinang	SMKN 4 Tanjungpinang
425	Tanah Bangunan Rumah Pendingin	1.3.1.01.00 1.004.014	0001	1.260,00	2011	Wacopek. Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur	Hak Pakai	22-Dec-17	NIB EL. 32.01.000002649.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	74.880.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	Bintan	Tanah Bangunan Pendingin

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
426	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0086	641,00	2020	Jalan Gurindam 12	Hak Milik	Belum Balik Nama		Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	1.265.078.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	KEGIATAN TAHUN JAMAK PENATAAN PANTAI GURINDAM 12 KOTA TANJUNGPINANG - Pengadaaan Tanah Untuk Aset Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertahanan
427	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0088	449,00	2020	Jalan Gurindam 12	Hak Milik	Belum Balik Nama		Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	405.666.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	KEGIATAN TAHUN JAMAK PENATAAN PANTAI GURINDAM 12 KOTA TANJUNGPINANG - Pengadaaan Tanah Untuk Aset Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertahanan
428	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0089	111,00	2021	Basuki rahmat-Dompak (Sp.Ramayana), Kota Tanjungpinang	Hak Milik		953	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	1.324.675.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Pembebasan lahan dan Bangunan untuk Fly Over (Sp Ramayana)
429	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0090	124,00	2021	Basuki rahmat-Dompak (Sp.Ramayana), Kota Tanjungpinang	Hak Milik		81	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	1.174.675.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI - Pembebasan Lahan dan Bangunan untuk Fly Over Basuki rahmat-Dompak (Sp.Ramayana), Kota Tanjungpinang SHM NO.81
430	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0091	376,00	2021	Basuki rahmat-Dompak (Sp.Ramayana), Kota Tanjungpinang	Hak Milik		80	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	1.334.675.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI - Pembebesan Lahan dan Bangunan untuk Fly Over Basuki rahmat-Dompak (Sp.Ramayana), Kota Tanjungpinang
431	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0029	443,82	2006	Jl. Pulau Kasu	Hak Pakai			Perorangan (Belum Balik Nama)	Hibah	110.955.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Batam	
432	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	10.434,00	2023	Desa.Kuala Sempang. Kec. Seri Kuala Lobam. Kab. Bintan	Hak Pakai	23-Sep-13	NIB EL. 32.01.000002628.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	P3D	469.530.000,00	Dinas Pendidikan	Bintan	SMK4 Kuala Sempang Lobam
433	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0362	364,00	28-Dec-22	Jl. ke Tg. Sebauk RT.03 RW.04 , Senggarang Kota Tanjungpinang	NULL	14-Dec-20	'HM.00805	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	55.906.060,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang
434	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0366	627,00	29-Dec-22	Jl. Datuk Pakau RT.03 RW.04, Senggarang Kota Tanjungpinang	NULL	14-Aug-19	HM.00699	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	79.752.060,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang
435	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0367	47,00	29-Dec-22	Jl. Datuk Pakau RT.03 RW.04, Senggarang Kota Tanjungpinang	NULL	14-Dec-20	HM.00799	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	18.289.660,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang
436	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0368	167,00	29-Dec-22	Jl. ke Tg. Sebauk, Senggarang Kota Tanjungpinang	NULL	5-Feb-16	HM.349	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	34.289.660,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang
437	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0369	96,00	28-Dec-22	Jl. Datuk Pakau RT.03 RW.04, Senggarang Kota Tanjungpinang	NULL	14-Dec-20	HM.00806	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	23.494.260,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang
438	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0370	499,00	28-Dec-22	Jl. Senggarang Darat RT.4 RW.4Kota	NULL	26-Aug-19	'HM.00682	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	71.636.460,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang
439	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0371	1.687,00	29-Dec-22	Jl. Datuk Pakau RT.03 RW.04 , Senggarang Kota Tanjungpinang	NULL	14-Dec-20	HM.00834	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	218.897.660,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang
440	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0372	3.239,00	29-Dec-22	Senggarang Kota Tanjungpinang	NULL	19-May-92	HM.00073	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	367.289.660,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang
441	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0373	51,00	28-Dec-22	Jl. Datuk Pakau, Senggarang Kota Tanjungpinang	NULL	14-Dec-20	HM.00835	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	19.523.660,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
442	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0374	1.383,00	30-Dec-22	Senggarang Kota Tanjungpinang	NULL	19-May-92	HM.00072	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	166.289.660,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang
443	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	14.724,00	2002	Jl. Pramuka No 1, Tanjungpinang	Hak Pakai	6-Jan-25	NIBEL. 32.05.000002889.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	2.944.800.000,00	Dinas Pendidikan	Tanjungpinang	SMKN 2 Tanjungpinang
444	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0377	3.729,00	44951	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	5-May-23	32.01.08.05.4.00045	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	561.001.666,67	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
445	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0383	218,00	45163	Jalan Senggarang, Kota Tanjungpinang	Hak Pakai	14-Dec-20	SERTIFIKAT HAK MILIK No.00799	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	24.208.200,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Jalan Senggarang, Kota Tanjungpinang
446	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0385	201,00	45184	jalan di Senggarang Kota Tanjungpinang	NULL	5-Feb-16	HM 351	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	25.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah Untuk Jalan
447	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	3.846,00	31/12/1994	Jl. Pelabuhan Perintis Pulau Berhala Kel. Letung Kec Jemaja Kab. Kepulauan Anambas	Hak Pakai	NULL	32.07.06.05.4.00005	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	61.536.000,00	Dinas Perhubungan	Anambas	Pelabuhan Letung
448	Lain-lain Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	1.3.1.01.00 1.004.026	0005	9.033,00	43196	Desa Teluk Sasah Kec Seri Kuala Lobam Kab Bintan Prov Kepulauan	Hak Pakai	10-Apr-17	32.01.08.02.4.00005	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	64.585.950,00	Dinas Perhubungan	Bintan	Hak Pakai
449	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0003	3.376,00	18/05/1990	Jalan Pelabuhan Dabo Singkep	Hak Pakai	NULL	32.06.01.01.4.00239	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	1.780.825.733,00	Dinas Perhubungan	Lingga	Kantor
450	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0004	11.400,00	31/12/2016	Pelabuhan Ranai, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna	Hak Pakai	5-Jul-23	32.04.01.09.4.00112	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	35.704.738.200,00	Dinas Perhubungan	Natuna	Pelabuhan
451	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0087	450,00	2020	Jalan Gurindam 12	Belum Balik Nama			Alas Hak	Pembelian	158.356.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	KEGIATAN TAHUN JAMAK PENATAAN PANTAI GURINDAM 12 KOTA TANJUNGPINANG - Pengadaaan Tanah Untuk Aset Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertahanan
452	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0002	41.650,00	2018	Jalan Asia Afrika, Tanjungpinang					Pembelian	4.202.222.500,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	
453	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0005	19.600,00	2018	Jalan Dompak Pelabuhan Roro Tanjungpinang					Pembelian	4.550.924.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	simpang lampu merah ke pabuhan roro, termasuk dengan pengadaan jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
454	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0008	31.260,00	2018	Jalan Handoyo Putro, Tanjungpinang					Pembelian	31.227.688.800,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	
455	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0011	112.000,00	2018	Jl. Dompak Seberang, Tanjungpinang					Pembelian	21.268.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	
456	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0018	111.600,00	2020	Sp. Km 15 - Jl. Nusantara kijang	Hak Pakai	21-Dec-23	32.01.01.01.4.00619	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	5.356.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Sertipikat Sebagian
457	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0019	47.500,00	2020	Km. 18 Kijang - Km. 20 Gesek					Pembelian	2.280.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
458	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0020	127.400,00	2020	SP. Korindo - Kangka					Pembelian	5.860.400.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
459	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0022	28.800,00	2020	Sp. Gesek - Tuapaya					Pembelian	1.065.600.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
460	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0023	127.800,00	2020	Tuapaya-Km.46					Pembelian	2.939.400.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
461	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0024	30.100,00	2020	Sp. Lagoi-Sp. Sei Kecil					Pembelian	1.264.200.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
462	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0025	74.200,00	2020	Tuapaya - Tembeling	Hak Pakai	11-Dec-24	NIB EL. 32.01.000002977.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	2.151.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
463	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0026	98.000,00	2020	Malang Rapat - Iome					Pembelian	2.254.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
464	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0028	99.000,00	2020	Sei Kecil - Jl. Sp. Sakera	Hak Pakai	2025	32.01.000003266.0 (19.321m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	2.871.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
465	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0029	33.000,00	2020	Jln. Trans Batubi - Sebangkar	Hak Pakai	2025	32.04.000002347.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	235.950.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Natuna	
466	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0030	25.800,00	2020	Sp. Harapan Jaya - Padang Angus	Hak Pakai	18-Dec-24	NIB. 32.04.000002073.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	129.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Natuna	
467	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0031	62.000,00	2020	Padang Angus - Cemaga	Hak Pakai	2025	32.04.000002371.0 32.04.000002344.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.240.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Natuna	
468	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0032	37.500,00	2020	Sp. Sekunyam - Pian tengah	Hak Pakai	2025	32.04.000002328.0 32.04.000002335.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	187.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Natuna	
469	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0033	29.000,00	2020	Padang Angus Binjai					Pembelian	580.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Natuna	
470	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0034	50.250,00	2020	Sp. Harapan Jaya - Sp. Bukit Leman	Hak Pakai	18-Dec-24	NIB. 32.04.000002073.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	123.112.500,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Natuna	
471	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0035	108.780,00	2020	Bukit Leman - Trans Batubi	Hak Pakai	2025	32.04.000002338.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	405.205.500,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Natuna	
472	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0036	44.400,00	2020	Trans Batubi - Tg. Kudu	Hak Pakai	18-Dec-24	NIB. 32.04.000002079.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	108.780.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Natuna	
473	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0037	197.890,00	2020	Trans Batubi - Kelarik	Hak Pakai	16 Dec 2024 16 Dec 2024 18 Dec 2024 18 Dec 2024	NIB. 32.04.000002065.0 NIB. 32.04.000002066.0 NIB. 32.04.000002070.0 NIB. 32.04.000002071.4	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	137.533.550,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Natuna	
474	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0038	29.400,00	2020	Bandarsyah - Penagi	Hak Pakai	16 Dec 2024 18 Dec 2024	NIB. 32.04.000002067.0 NIB. 32.04.000002078.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	294.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Natuna	
475	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0039	56.960,00	2020	Jl. Lingkar Serasan					Pembelian	407.264.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Natuna	
476	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0040	21.150,00	2020	Batu bayan - Cemaga	Hak Pakai	2025	32.04.000002324.0 32.04.000002336.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	571.050.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Natuna	
477	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0041	24.000,00	2020	Setengar - Teluk Dapih	Hak Pakai	2025	32.04.000002379.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	480.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Natuna	
478	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0042	30.000,00	2020	Sp. Letung - Bandara	Hak Pakai	18-Dec-24	NIB. 32.07.000001503.0 NIB. 32.07.000001509.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	31.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Anambas	
479	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0043	30.550,00	2020	Jalan Kampung Melayu - Tiangau					Pembelian	1.558.050.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Anambas	
480	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0044	40.000,00	2020	Jalan Payalaman - Ladan					Pembelian	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Anambas	
481	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0045	26.300,00	2020	Sp. Payalaman - Langir					Pembelian	526.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Anambas	
482	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0046	152.600,00	2020	Letung - Kuala Maras	Hak Pakai	18-Dec-24	NIB. 32.07.000001505.0 NIB. 32.07.000001510.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	15.717.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Anambas	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
483	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0047	5.760,00	2020	Sp. SMAN 1 Letung - Padang Melang	Hak Pakai	18-Dec-24	NIB. 32.07.000001507.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	5.241.600,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Anambas	
484	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0048	17.220,00	2020	Letung - pelabuhan Letung	Hak Pakai	18-Dec-24	NIB. 32.07.000001504.0 NIB. 32.07.000001508.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	172.200.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Anambas	
485	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0049	121.100,00	2020	Simpang Pelabuhan Tanjung Berlian - Simpang Urung	Hak Pakai	17-Dec-24	NIB. 32.03.000004568.0 (18 dec 24) NIB. 32.03.000004575.0 (17 dec 24) NIB. 32.03.000004580.4 (17 dec 24)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	4.266.353.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Karimun	
486	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0050	37.000,00	2020	Jalan Parit Tegak					Pembelian	185.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Karimun	
487	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0051	18.000,00	2020	Jalan sei Buluh - Batu Limau - Alai					Pembelian	90.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Karimun	
488	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0052	60.200,00	2020	Simpang Batu gajah - (Sp. Limbung) - Musai	Hak Pakai	10-Jan-24	32.06.02.04.4.00007 32.06.02.09.4.00010 32.06.08.06.4.00015 32.06.02.07.4.00026 32.06.08.05.4.00029 32.06.04.06.4.00039 32.06.04.06.4.00040 NIB. 32.06.000003809.0 (17 dec 24)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	526.750.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
489	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0053	119.630,00	2020	Sp. Setajam - Serteh	Hak Pakai	17-Dec-24	NIB. 32.06.000003784.0 NIB. 32.06.000003785.0 NIB. 32.06.000003793.0 NIB. 32.06.000003794.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	939.095.500,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
490	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0054	10.850,00	2020	Sp. Pahang - Sp. Tanda					Pembelian	292.950.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
491	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0055	68.600,00	2020	Daik - Musai	Hak Pakai	17-Dec-24	NIB. 32.06.000003792.0 NIB. 32.06.000003801.0 NIB. 32.06.000003811.0 NIB. 32.06.000003812.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.766.450.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
492	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0056	48.300,00	2020	Musai - Simpang Kerandin	Hak Pakai	17-Dec-24	NIB. 32.06.000003782.0 NIB. 32.06.000003802.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	326.025.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
493	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0057	247.800,00	2020	Simpang Kerandin - Belungkur	Hak Pakai	17-Dec-24	32060000037800 32060000037810 32060000037830 32060000037910 32060000038100 32060000038150	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	2.478.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
494	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0058	105.720,00	2020	Simpang Sungai Tenam - Mentuda					Pembelian	1.057.200.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
495	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0059	33.960,00	2020	Simpang Panggak Darat - Simpang Panggak Laut					Pembelian	368.466.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
496	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0060	27.180,00	2020	Simpang Linau - Linau					Pembelian	271.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
497	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0061	26.000,00	2020	Simpang Kerandin - Kerandin					Pembelian	260.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
498	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0062	54.600,00	2020	Linau - Limbung	Hak Pakai	10-Jan-24	32.06.04.04.4.00217 NIB. 32.06.000003780.0 (17 dec 24) NIB. 32.06.000003786.0 17 dec 24) NIB. 32.06.000003808.0 17 dec 24)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	655.200.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
499	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0063	40.800,00	2020	Simpang Rantau Panjang - Rantau Panjang	Hak Pakai	10-Jan-24	32.06.04.05.4.00008 NIB. 32.06.000003796.0 (17 dec 24)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	69.360.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
500	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0064	69.780,00	2020	Simpang Budus - Pelabuhan Roro Penarik					Pembelian	837.360.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
501	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0065	108.000,00	2020	Dabo - Simpang Marok Tua	Hak Pakai	17-Dec-24	NIB. 32.06.000003787.0 NIB. 32.06.000003789.0 NIB. 32.06.000003798.0 NIB. 32.06.000003814.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	3.078.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
502	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0066	148.200,00	2020	Simpang Marok Tua - Marok Tua	Hak Pakai	17-Dec-24	NIB. 32.06.000003790.0 NIB. 32.06.000003799.0 NIB. 32.06.000003800.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.482.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
503	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0067	49.000,00	2020	Simpang Marok Tua-Simpang Kuala Raya	Hak Pakai	17-Dec-24	NIB. 32.06.000003814.0 NIB. 32.06.000003795.0 NIB. 32.06.000003813.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	735.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
504	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0068	18.500,00	2020	Simpang Kuala Raya - Kuala Raya					Pembelian	370.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
505	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0069	25.000,00	2020	Simpang Kuala Raya - SImpang Sungai Buluh	Hak Pakai	17-Dec-24	NIB. 32.06.000003813.0 NIB. 32.06.000003797.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
506	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0070	2.750,00	2020	Simpang Sungai Buluh - Sungai Buluh					Pembelian	99.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
507	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0071	41.000,00	2020	Simpang Sungai Buluh - Sp. Jagoh	Hak Pakai	17-Dec-24	NIB. 32.06.000003797.0 NIB. 32.06.000003819.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.476.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
508	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0072	47.700,00	2020	Dabo - Kebun Nyiur					Pembelian	1.192.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
509	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0073	72.240,00	2020	Simpang Marok Kecil - Marok Tua					Pembelian	619.458.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
510	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0074	6.000,00	2020	Dabo - Pelabuhan Dabo					Pembelian	837.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
511	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0075	51.100,00	2020	SP. Sialang - Pelabuhan Berakit					Pembelian	2.325.050.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
512	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0076	99.360,00	2020	Sp. Tanjung - Sp. Bukit Leman	Hak Pakai	2025	32.04.000002334.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	238.464.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Natuna	
513	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0077	81.000,00	2020	Sp. Lagoi - Lintas Barat					Pembelian	2.349.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
514	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0078	62.940,00	2020	Simpang Tugu - Pelabuhan Malarko					Pembelian	786.750.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Karimun	
515	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0079	10.780,00	2020	Jl. Nusantara - Setiabudi					Pembelian	9.890.650.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Karimun	
516	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0080	55.000,00	2020	Tanjung Balai - Sei bati					Pembelian	9.900.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Karimun	
517	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0081	51.870,00	2020	Simpang Sei Bati-Simpang Tugu Stadion-Jelutung	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.03.000004140.4	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	3.916.185.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Karimun	
518	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0082	117.600,00	2020	Jalan Pesisir Pantai Karimun					Pembelian	23.402.400.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Karimun	
519	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0083	91.700,00	2020	Sei Asam-Sebele-Penarah-Lebuh (Lebuh - Penarah - Sebele)	Hak Pakai	17-Dec-24	NIB. 32.03.000004569.0 NIB. 32.03.000004581.0 NIB. 32.03.000004615.4	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	365.653.750,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Karimun	
520	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0084	301.000,00	2020	Tanjung Batu-Simpang urung-Simpang Sawang-Sawang- Simpang Perayun- Pelabuhan Tanjung Magom (RUAS 93 SP TUGU NENAS - SP URUNG)	Hak Pakai	17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 17 Dec 2024 17 Dec 2024 17 Dec 2024 17 Dec 2024 18 Dec 2024	NIB. 32.03.000004571.4 NIB. 32.03.000004576.0 NIB. 32.03.000004578.4 NIB. 32.03.000004579.4 'NIB. 32.03.000004570.0 NIB. 32.03.000004572.0 NIB. 32.03.000004573.0 NIB. 32.03.000004574.0 NIB.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	17.797.461.111,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Karimun	
521	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0085	144.000,00	2020	Simpang perayun-Simpang Kempas-Pelabuhan Tanjung Berlian (Sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian)					Pembelian	2.152.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Karimun	
522	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0092	156,00	2021	Basuki rahmat-Dompak (Sp.Ramayana), Kota Tanjungpinang					Pembelian	1.324.675.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Pembebasan Lahan dan Bangunan untuk Fly Over Basuki rahmat-Dompak (Sp.Ramayana), Kota Tanjungpinang
523	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0235	1.726,00	2021	Tg. Uban Selatan	Hak Pakai	23-Dec-22	32.01.08.05.4.00036	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	268.596.158,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Sarinem No.Bidang 31 Reg No.638/BU/1994
524	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0316	3.738,00	2021	Tanjung Uban, Bintan Kepulauan Riau	Hak Pakai	12-Apr-23	32.01.08.05.4.00042	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	519.622.267,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
525	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	600,00	1987	Jl. Kartini					Hibah	396.300.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 1 Batam
526	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	12.853,43	1987	Jln. R. Soeprapto No.1 Sekupang					Hibah	3.442.137.505,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 1 Batam
527	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	50.000,00	1996	Jl. Prof. Dr. Hamka No. 1 Tembesi					Hibah	5.000.000.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 1 Batam
528	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	15.000,00	2002	Jln. Pendidikan No. 8 Bengkong Sadai, Kec. Bengkong					Hibah	6.580.500.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 8 Batam
529	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	15.000,00	2002	Jl. Kav. Lama, Batam					Hibah	5.388.000.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 5 Batam

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
530	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	4.039,00	2002	Pulau Air Raja, Batam					Hibah	11.713.100,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 6 Batam
531	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	384,00	2002	Pulau Air Raja, Batam					Hibah	1.190.400,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 6 Batam
532	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	18.000,00	2003	Jl. Merbau Kel. Karas Kec.Galang					Hibah	84.600.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 9 Batam
533	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	2.937,00	2004	Sijantung RT01/RW02					hibah	23.496.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 10 Batam
534	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	16.000,00	2006	Kel.Baloi Permai Kec. Batam Kota Batam jln. Pemuda no.5, Batam Kota Batam Centre					hibah	13.376.000.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 2 Batam
535	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	8.900,00	2007	Jl. Tamalatea Kel. Tg. Sengkuang Kec Batu Ampar			32.02.000056782.4		hibah	5.286.600.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 14 Batam
536	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	1.550,00	2009	Kav. Bukit Kamboja RT 03/ RW:IV Sei Pelunggut Sagulung Batam Kep. Riau					hibah	440.665.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 5 Batam
537	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	5.781,38	2010	Kav Mangsang Permai Kel Mangsang Kec Sei Beduk			32.02.000055625.4		hibah	1.918.838.362,50	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 16 Batam
538	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	1.841,60	2014	Batam Kota					hibah	150.854.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 7 Batam
539	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.000,00	2007	JL. Let.Jend. S.Parman Kel. Duriangkang Kec. Sei. Beduk kota Batam			32.02.000057793.4		hibah	5.858.000.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 3 Batam
540	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	9.488,00	2009	Jl. Hang Kesturi Jabi Batu Besar Nongsa					hibah	3.813.631.200,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 15 Batam
541	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.000,00	2010	Kp.Panau Kel. Kabil Kec. Nongsa Batam					hibah	5.964.000.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 6 Batam
542	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	732,70	2006	Jl.Raja Ali Haji No. 1 Kel. Pulau Buluh					hibah	250.000.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 11 Batam
543	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	10.189,24	2009	Dapur 12			32.02.000056781.4		hibah	2.952.780.884,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 17 Batam
544	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	2.650,00	2009	Kav. Bukit Kamboja RT 03/ RW:IV Sei Pelunggut Sagulung Batam Kep. Riau					hibah	656.670.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 5 Batam
545	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	18.734,00	2002	Jln. Raya Senggarang					Hibah	880.000.000,00	Dinas Pendidikan	Tanjungpinang	SMAN 6 Tanjungpinang
546	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.000,00	1999	JALAN BATU LIPAI	Hak Pakai	11-Nov-24	NIBEL.32030000041220 (9778m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	460.000.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMKN 1 Moro
547	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.000,00	1999	JALAN SEI BURU PANGKALAN BALAI	Hak Pakai	18-Dec-24	NIB. 32.03.000004614.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	140.000.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 1 Buru
548	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	10.500,00	1999	Jalan Sersan H. Ibrahim Yakub					Hibah	220.500.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 1 Durai
549	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	9.815,00	1999	JALAN RAJA OESMAN KAPLING					Hibah	5.741.775.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 1 Karimun
550	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	40.000,00	1999	JALAN SEI BATI					Hibah	2.120.000.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 4 Karimun

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
551	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	91.368,00	1999	JALAN POROS PAYA CINCIN SEI BETI					Hibah	4.842.504.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMKN 1 Karimun
552	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	18.000,00	2009	Jalan Kempas Dusun Nyiur	Hak Pakai	11-Nov-24	NIBEL.320300000413 90 (9782m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	410.954.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 2 Moro
553	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.900,00	2005	JL. SEGILING					Hibah	209.000.000,00	Dinas Pendidikan	Bintan	SKT
554	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	30.000,00	2005	JL. TOK SADEK TEMBELING	Hak Pakai	24-Sep-24	32.01.000001961.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	3.000.000.000,00	Dinas Pendidikan	Bintan	SMAN 1 Tembeling
555	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	21.600,00	2005	JL. SEKERAH NO. 11	Hak Pakai	5-Mar-24	32.01.03.02.4.00013 (21.600 m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	2.358.314.999,00	Dinas Pendidikan	Bintan	SKT
556	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	10.000,00	2005	JL. PASAR BARU					Hibah	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan	Bintan	
557	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.000,00	2005	JL. KORINDO SEI LEKOP	Hak Pakai	11-Dec-24	NIB. 32.01.000002690.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	100.000.000,00	Dinas Pendidikan	Bintan	SMKN 1 Bintan Timur
558	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	12.337,00	1994	Jl.Pelajar RT.004/RW.008 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kab.Lingga					Hibah	1.937.489.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 1 SINGKEP terindikasi double catat
559	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	22.500,00	2008	Jl. Kartini, Dabo Singkep, Kec. Singkep	Hak Pakai	13-Nov-24	06000037150 (Luas 14	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	6.097.850.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 2 SINGKEP ada indikasi lahan belum terukur sebelah barat
560	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.000,00	2011	Dusun II Desa Rejai					Hibah	39.200.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 3 SENAYANG
561	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.000,00	2011	Desa Temiang Dusun I Tajur Biru Kec.Senayang, Kab.Lingga					Hibah	2.470.960.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 4 SENAYANG
562	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	60.000,00	2016	Tanjung Mulia, Dusun Muntai, Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah					Hibah	6.979.500,00	Dinas Pendidikan	Anambas	SMKN 2 Anambas
563	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	60.000,00	2001	Jl. Taruna - Bandarsyah					Hibah	300.000.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMKN 1 Bunguran Timur
564	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.000,00	2001	Jl. Ibrahim, Kelarik					Hibah	50.000.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 1 Bunguran Utara
565	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.000,00	2001	Jl. Pantai sisi, Serasan					Hibah	120.000.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 1 Serasan
566	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	6.200,00	2001	JL. Raya Tanjung Lampung			Surat Pernyataan Hibah Nomor 02/593/2006, tanggal 16 Mei 2006		Hibah	1.122.750.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 1 Midai
567	Tanah Bangunan Gudang	1.3.1.01.00 1.002.003	0001	20.000,00	2009	JALAN MUNUNG LAUT DESA CEMAGA KECAMATAN BUNGURAN TIMUR	Hak Pakai	240ct 24	32.04.02.01.4.00012 (11.400m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	600.000.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 1 Bunguran Selatan
568	Tanah Bangunan Gudang	1.3.1.01.00 1.002.003	0001	5.524,00	2009	JL. TANJUNG DESA TANJUNG KEC. BUNGURAN TIMUR LAUT					Hibah	215.436.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 1 Bunguran Timur Laut
569	Tanah Bangunan Gudang	1.3.1.01.00 1.002.003	0002	9.995,00	2009	JL. TANJUNG DESA TANJUNG KEC. BUNGURAN TIMUR LAUT					Hibah	389.805.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 1 Bunguran Timur Laut
570	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.000,00	2006	Desa Tanjung Ke.Bunguran Timur Laut					Hibah	360.000.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMKN 1 Bunguran Timur Laut

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
571	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	5,41	2007	JL. SIHOTANG KEL. RANAI					Hibah	1.595.360.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	Sekolah Luar Biasa Negeri Natuna
572	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	11.400,00	2017	DESA CEMAGA, KECAMATAN BUNGURAN SELATAN NATUNA	Hak Pakai	24-Oct-24	NIB. 32.04.000001692.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	952.487.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 1 Bunguran Selatan
573	Tanah Lapangan Olahraga Lain-lain	1.3.1.01.00 3.001.999	0001	1.500,00	2021	SMKN 9 BATAM	Hak Pengelolaan				Pembelian	43.789.201,20	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 9 Batam
574	Tanah Lapangan Apel/Upacara	1.3.1.01.00 3.002.006	0001	150,00	2021	SMAN 1 PULAU LAUT	Hak Pengelolaan				Pembelian	119.830.920,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 1 Pulau Laut
575	Tanah Bangunan Bangunan Pembibitan	1.3.1.01.00 1.004.013	0001	500.185,00	2007	Desa Toapaya, jl. Tembeling/Lembah sari/Sungai Ngiri, Kec. Gunung Kijang	Hak Pakai	14-Nov-24	NIB. 32.01.000002479.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.500.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	Bintan	Bangunan Balai Penyulu Pembibitan
576	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0002	769,00	2006	Jl. Batu Hitam TPI					Hibah	769.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
577	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0003	1.305,00	2006	Tambelan					Hibah	293.625.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Bintan	5 Rumah Dinas
578	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0007	112.397,00	2006	Jl. Desa Toa Paya	Hak Pakai			Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	16.859.550.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Bintan	
579	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0015	320,00	2006	Jl. Merdeka Tanjungpinang					Hibah	637.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	POMAL Tanjungpinang (Double PenCatatan Antara Pemprov Dan Al)
580	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0019	2.000,00	2006	Jl. Ranai	Hak Pakai				Hibah	550.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Natuna	
581	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0022	4.565,00	2006	Kampung Baru Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kepulauan Anambas					Hibah	1.412.500.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Anambas	digunakan sebagai rumah dinas UPT LHK Anambas
582	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0025	500,00	2006	Jl. Rejai - Kec.Senayang					Hibah	125.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Lingga	
583	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0027	163,00	2006	Jl. Kec. Singkep - Lingga					Hibah	36.675.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Lingga	
584	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0028	400,00	2006	Jl. Dabo Singkep					Hibah	90.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Lingga	
585	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0029	1.600,00	2006	Jl. Desa Kep. Lanjutan					Hibah	240.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Lingga	
586	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0030	1.800,00	2006	Jl. Desa Payuluas					Hibah	360.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Lingga	
587	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0031	1.400,00	2006	Jl. Kel. Daik Sipicau					Hibah	210.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Lingga	
588	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0036	4.565,00	2006	Tanjung Momong Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kepulauan Anambas					Hibah	1.380.283.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Anambas	(Luas sebenarnya 225 M2)
589	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0037	4.510,00	2006	Genting Dusun Kel. Letung Kec. Jemaja Kab. Kepulauan Anambas					Hibah	789.250.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Anambas	
590	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0038	150,00	2006	Tanjungpinang					Hibah	150.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
591	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0370	733,00	2008	Tanah Jalan / Dompak persil J1					Pembelian	436.000.128,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
592	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0371	2.149,00	2008	Tanah Jalan / Dompak persil J2					Pembelian	214.912.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
593	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0040	617,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J3					Pembelian	176.011.500,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
594	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0096	2.320,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J4					Pembelian	26.960.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
595	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0109	2.677,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J5					Pembelian	27.016.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
596	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0105	803,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J6					Pembelian	6.424.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
597	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0098	3.564,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J7					Pembelian	28.512.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
598	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0110	1.784,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J8					Pembelian	14.272.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
599	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0108	1.432,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J9					Pembelian	11.456.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
600	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0106	503,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J10					Pembelian	4.024.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
601	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0107	520,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J11					Pembelian	4.160.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
602	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0097	497,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J12					Pembelian	3.976.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
603	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0089	1.964,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J13					Pembelian	15.712.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
604	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0091	1.580,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J14					Pembelian	12.640.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
605	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0088	2.248,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J15					Pembelian	17.984.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
606	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0090	1.474,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J16					Pembelian	11.792.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
607	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0087	4.721,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J17					Pembelian	40.698.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
608	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0081	6.258,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J18					Pembelian	50.064.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
609	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0083	2.490,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J19					Pembelian	19.920.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
610	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0085	1.930,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J20					Pembelian	15.440.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
611	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0086	1.849,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J21					Pembelian	14.792.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
612	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0084	1.054,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J22					Pembelian	8.432.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
613	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0167	18.767,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P 1	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	93.835.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
614	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0168	13.388,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P2	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	66.940.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
615	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0172	5.142,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P11					Pembelian	16.968.600,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
616	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0173	19.475,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P12					Pembelian	64.267.500,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
617	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0178	11.573,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P17					Pembelian	49.185.250,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
618	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0179	19.119,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P18	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	81.255.750,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
619	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0180	9.453,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P19					Pembelian	40.175.250,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
620	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0183	27.764,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P22	Hak Pakai		Blok 2	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	115.220.600,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
621	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0202	28.365,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P43					Pembelian	117.714.750,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
622	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0204	13.210,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P46	Hak Pakai	16-Dec-20	32.05.04.05.4.00052	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	39.630.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
623	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0205	39.216,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P47	Hak Pakai	16-Dec-20	32.05.04.05.4.00052	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	107.844.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
624	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0211	5.953,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P53	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000003027.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	20.704.200,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 11
625	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0213	19.925,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P55					Pembelian	102.618.900,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
626	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0214	19.997,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P56					Pembelian	102.984.550,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
627	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0215	19.990,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P57					Pembelian	102.948.500,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
628	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0216	27.459,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P58	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002886.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	116.700.750,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
629	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0217	162.598,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P59	Hak Pakai	16-Dec-20	32.05.04.05.4.00052	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	691.041.500,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 11
630	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0218	20.453,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P60	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002887.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	81.812.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
631	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0219	11.159,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P61	Hak Pakai	16-Dec-20	32.05.04.05.4.00052	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	44.636.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
632	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0221	44.698,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P63	37				Pembelian	185.794.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
633	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0228	10.003,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P70	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00036	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	30.009.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
634	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0230	9.296,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P72					Pembelian	37.182.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
635	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0234	11.171,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P76					Pembelian	43.513.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
636	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0247	59.873,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P89	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	251.537.820,92	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
637	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	19.654,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P90	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	82.570.179,08	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
638	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0248	13.375,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P91					Pembelian	53.500.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
639	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0163	850,00	2011	Tanah Perkantoran / Dompak persil P317					Pembelian	47.558.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
640	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0164	6.836,00	2011	Tanah Perkantoran / Dompak persil P318	Hak Pakai	19-Oct-22	32.05.04.05.4.00075	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	33.305.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 7 Blok 8
641	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0165	1.245,00	2011	Tanah Perkantoran / Dompak persil P319	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	12.759.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
642	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0166	11.458,00	2011	Tanah Perkantoran / Dompak persil P320	Hak Pakai	11-Nov-24	NIB. 32.05.000001795.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	66.724.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
643	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0261	9.709,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P105	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	38.722.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
644	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0268	76.403,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P112	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002887.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	330.943.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
645	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0275	6.284,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P119					Pembelian	48.525.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
646	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0276	11.363,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P120	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002887.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	45.452.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
647	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0280	23.985,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P124	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002886.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	100.269.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
648	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0283	7.163,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P128	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	23.863.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
649	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0285	19.952,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P130					Pembelian	99.760.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
650	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0286	9.287,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P131					Pembelian	41.359.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
651	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0287	28.123,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P132	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	147.722.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
652	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0290	14.203,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P135	Hak Pakai	16-Dec-20	32.05.04.05.4.00052	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	71.793.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
653	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0292	4.630,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P137	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	21.935.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
654	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0297	15.092,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P142	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002887.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	93.989.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
655	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0300	13.572,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P145					Pembelian	64.147.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
656	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0301	9.914,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P146	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000003027.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	40.996.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 11
657	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0302	16.163,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P147	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	78.031.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
658	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0305	5.338,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P150	Hak Pakai				Pembelian	102.301.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 11
659	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0310	35.059,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P157	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002887.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	175.297.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
660	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0315	26.037,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P162					Pembelian	85.226.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
661	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0318	9.166,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P165					Pembelian	27.498.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
662	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0320	5.145,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P167	Hak Pakai	16-Dec-20	32.05.04.05.4.00052	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	38.319.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
663	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0324	1.693,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P171	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	5.079.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
664	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0325	3.963,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P172	Hak Pakai	2025	32.05.000007215.0 (5231)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	15.852.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
665	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0325	4.923,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P173	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	19.692.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
666	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0325	6.387,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P174					Pembelian	28.965.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
667	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0326	7.459,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P175	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	42.831.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
668	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0329	11.642,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P178	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002887.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	69.977.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
669	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0334	2.942,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P183	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	8.826.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
670	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0335	15.834,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P184					Pembelian	68.793.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
671	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0336	7.615,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P185					Pembelian	30.460.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
672	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0337	2.315,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P186	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	6.945.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
673	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0338	11.281,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P187					Pembelian	45.124.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
674	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0340	7.671,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P189	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	48.270.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
675	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0342	19.553,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P191					Pembelian	78.212.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
676	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0343	8.993,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P192	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002886.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	40.769.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
677	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0344	26.047,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P193	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002887.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	133.948.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
678	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0345	5.561,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P194	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000003027.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	28.979.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
679	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0350	10.398,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P199	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	47.579.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
680	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0351	6.923,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P200	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	20.769.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
681	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0352	8.268,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P201	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	24.804.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
682	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0354	40.007,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P203	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	188.761.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
683	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0355	9.679,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P204					Pembelian	38.716.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
684	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0356	4.053,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P205	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002887.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	51.817.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
685	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0359	2.413,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P208	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	34.646.070,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 11
686	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0365	76.063,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P214	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	361.078.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
687	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0366	5.617,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P215					Pembelian	231.073.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
688	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0368	5.330,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P217					Pembelian	25.704.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
689	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0068	13.103,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P219	Hak Pakai		Blok 2	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	44.810.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
690	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0077	1.922,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P224	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000003027.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	9.237.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
691	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0075	6.317,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P227					Pembelian	50.971.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
692	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0074	16.307,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P228	Hak Pakai		Blok 7	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	77.842.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 7
693	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0073	11.508,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P229					Pembelian	53.916.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
694	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0072	5.171,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P230	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000001797.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	15.513.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
695	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0061	1.562,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P234	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	9.655.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
696	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0063	305,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P235	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	31.915.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
697	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0062	1.917,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P236	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	41.286.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
698	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0066	725,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P238	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	7.705.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
699	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0060	48,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P240					Pembelian	25.944.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
700	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0059	2.300,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P242	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	98.828.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
701	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0057	3.483,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P243					Pembelian	20.992.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
702	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0041	2.491,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P244					Pembelian	9.964.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
703	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0043	4.415,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P247	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00075	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	89.033.810,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
704	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0046	9.097,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P249	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000003025.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	36.388.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
705	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0045	5.204,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P250	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	91.171.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
706	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0050	6.202,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P254	Hak Pakai	19-Oct-22	32.05.04.05.4.00074	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	74.693.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 11
707	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0051	1.397,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P255	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	91.860.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
708	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0054	2.688,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P258					Pembelian	89.725.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 11
709	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0112	326,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P264	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	69.185.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
710	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0080	7.055,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P273	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002886.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	73.235.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
711	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0093	7.421,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P274					Pembelian	31.038.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
712	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0092	5.778,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P275					Pembelian	25.999.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
713	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0118	3.614,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P276	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	15.536.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
714	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0117	11.087,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P277	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000003025.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	50.628.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
715	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0119	12.587,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P278	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002886.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	69.491.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
716	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0120	17.825,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P279					Pembelian	71.300.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
717	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0121	16.186,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P280					Pembelian	91.963.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
718	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0122	2.430,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P281					Pembelian	16.290.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
719	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0125	559,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P282					Pembelian	3.207.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
720	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0127	3.053,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P284	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	12.212.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
721	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0128	5.133,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P285					Pembelian	93.803.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
722	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0133	4.239,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P289					Pembelian	242.720.300,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
723	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0134	3.603,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P290	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	79.663.600,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 11
724	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0136	2.742,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P291					Pembelian	173.986.700,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
725	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0137	23.528,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P292	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	104.612.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
726	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0138	3.082,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P293	Hak Pakai	12-Nov-24	NIB. 32.05.000002893.0 NIB.32.05.000007216. 0 (2.319)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	68.349.200,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
727	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0139	25.646,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P294	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000001797.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	149.980.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
728	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0145	1.849,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P299	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002886.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	14.475.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
729	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0146	5.944,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P300					Pembelian	30.126.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
730	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0147	2.311,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P301					Pembelian	25.992.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 11
731	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0148	9.803,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P302					Pembelian	29.409.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
732	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0149	3.192,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P303	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002886.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	25.791.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
733	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0151	5.433,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P305					Pembelian	21.732.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
734	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0152	9.437,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P306	Hak Pakai		Blok 14	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	39.918.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
735	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0153	981,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P307					Pembelian	36.424.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
736	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0154	1.068,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P308					Pembelian	49.630.600,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
737	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0155	4.539,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P309	Hak Pakai	2025	NIB.32.05.000007217. 0 (3748)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	194.038.550,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
738	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0156	1.010,00	2011	Tanah Perkantoran / Dompak persil P310			7.0		Pembelian	31.187.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
739	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0157	364,00	2011	Tanah Perkantoran / Dompak persil P311					Pembelian	5.090.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
740	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0160	2.260,00	2011	Tanah Perkantoran / Dompak persil P314					Pembelian	12.010.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
741	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0162	1.780,00	2011	Tanah Perkantoran / Dompak persil P316	Hak Pakai	12-Nov-24	NIB. 32.05.000002892.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	25.389.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
742	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0373	487.174,00	2006	Penarik II Senggarang					Hibah	17.538.084.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Hibah dari Bintan Tahun 2006 berdasarkan BA Nomor13/BA/ADM-PEM/VI/2006
743	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.004.999	0001	14.700,00	2006	Jl. Kab. Lingga	Hak Pakai	10-Jan-24	32.06.02.08.4.00006	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	3.075.279.851,00	Dinas Perhubungan	Lingga	
744	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1.3.1.01.00 1.004.026	0002	13.000,00	2006	Tanah Pelabuhan Kijang	Hak Pakai	3-Jul-25	NIB.32.01.000004318. 0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	2.038.660.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Bintan	kapitalisasi ke tanag upt dkp
745	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0006	365,75	2006	Jl. Hangtuah TPI					Hibah	731.500.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
746	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0007	125,75	2006	Jl. Hermansyah TPI					Hibah	188.625.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
747	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0013	158,50	2006	Jl. Pulau Buluh					Hibah	23.775.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Batam	
748	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0001	240,00	2006	Jl. Kartini III Sei Harapan No. 22					Hibah	53.600.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	
749	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0017	280,00	2006	Jl. Kartini III Sei Harapan No.10	Hak Pakai	2025	NIB.32.02.000055622.4	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	53.600.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Batam	
750	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0018	200,00	2006	Jl. Kartini III Sei Harapan No. 08	Hak Pakai	2025	NIB.32.02.000055620.4	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	53.600.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Batam	
751	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0019	220,00	2006	Jl. Kartini III Sei Harapan No. 09	Hak Pakai	2025	NIB.32.02.000055626.4	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	53.600.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Batam	
752	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0020	210,00	2006	Jl. Kartini III Sei Harapan No.11	Hak Pakai	2025	NIB.32.02.000055621.4	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	53.600.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Batam	
753	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0021	252,00	2006	Jl. Kartini III Sei Harapan No. 07	Hak Pakai	2025	NIB.32.02.000055624.4	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	53.600.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Batam	
754	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0002	220,00	2006	Jl. Kartini III Sei Harapan no. 23					Hibah	53.600.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
755	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0023	189,00	2006	Jl. Kartini III Sei Harapan No. 12	Hak Pakai	2025	NIB.32.02.000055623.4	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	53.600.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Batam	
756	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0024	200,00	2006	Jl. Kartini III Sei Harapan No. 25					Hibah	53.600.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Batam	
757	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1.3.1.01.00 1.001.005	0001	2.627,00	2006	Jl. Kartini I Sei Harapan No. 30					Hibah	3.660.325.782,83	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Batam	
758	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0003	500,00	2006	Jl. Tangsi					Hibah	250.000.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	
759	Tanah Kebun Induk	1.3.1.01.00 2.003.002	0003	40.000,00	2006	Jl. Desa Brindat KM.5					Hibah	6.000.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Lingga	
760	Tanah Kebun Induk	1.3.1.01.00 2.003.002	0004	10.000,00	2006	Jl. Desa Kuala Paya					Hibah	1.500.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Lingga	
761	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.3.1.01.00 2.002.002	0001	4.674,00	2006	Tanah Kosong Barek Motor - Kijang	Hak Pakai	3-Jul-25	NIB.32.01.000004318.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	1.623.300.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Bintan	Tanah Bangunan Psar Barek Motor
762	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	1.3.1.01.00 2.001.003	0001	17.173,00	2006	Jl. St Mahmud TPI					Hibah	3.434.600.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
763	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	2.000,00	1999	PASIR PANJANG SEMEMAL					Hibah	70.076.300,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Karimun	Permohonan Sertipikat
764	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	54.312,00	1980	JL. BASUKI RAHMAT NO.1	Hak Pakai				Hibah	29.398.961.221,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanh Bangunan EX kantor Bupati Sertipikat belum Diketemukan Keberadaanya
765	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0003	6.000,00	2021	Jl. Engku Putri No.8, Tlk. Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29432					Pembelian	7.644.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Batam	Gedung Graha Kepri
766	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0351	1.909,00	25-Oct-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	5-May-23	32.01.08.05.4.00046	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	274.735.500,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
767	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0353	308,00	25-Oct-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	5-May-23	32.01.08.05.4.00046	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	41.205.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
768	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0354	106,00	25-Oct-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	5-May-23	32.01.08.05.4.00046	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	17.987.900,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
769	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0361	412,00	2022	RT.004/RW.004 Kel. Senggarang Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang	NULL	24-Oct-22	SKPPT 008/G-1/2022		Pembelian	57.126.660,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang
770	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0363	71,00	2022	Senggarang Darat RT.003/RW.004 Kel. Senggarang Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang	NULL	20-Nov-12	SKGK 212/590/XI/2012		Pembelian	21.453.460,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang
771	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0364	346,00	2022	Senggarang Darat RT.003 RW.004 Kota Tanjungpinang	NULL	2-Dec-16	SKGK 139/590/XII/2016		Pembelian	51.807.660,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang
772	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0365	628,00	2022	Senggarang Darat RT.003 RW.004 Kota Tanjungpinang	NULL	9-Mar-04	SKGK 17/590/III/2004		Pembelian	79.046.460,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang
773	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0375	852,00	2022	Senggarang Darat RT.003 RW.004 Kota Tanjungpinang	NULL	29-Jan-14	SKGK 14/590/I/2014		Pembelian	106.541.260,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
774	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	1.000,00	10-Dec-22	Jl. Pasar Baru No. 1 Tanjung Uban, Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara					Pembelian	45.400.000,00	Dinas Pendidikan	Bintan	SMKN 1 BINTAN
775	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	10.000,00	28-Dec-01	JL. TENGKU HASAN BIN TENGKU SINDOET NO. 1, Kukup, Kec. Tambelan, Kab. Bintan, Kepulauan Riau					Hibah	50.000.000,00	Dinas Pendidikan	Bintan	SMAN 1 TAMBELAN
776	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	10.000,00	31-Dec-08	Jl. Pasar Baru No. 1 Tanjung Uban, Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara	Hak Pakai	24-Sep-24	32.01.000001960.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	170.000.000,00	Dinas Pendidikan	Bintan	SMKN 1 BINTAN
777	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001		2001	Jl. Korindo Km. 22, Sungai Lekop, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Kepri	Hak Pakai	11-Dec-24	NIB. 32.01.000002690.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	300.000.000,00	Dinas Pendidikan	Bintan	SMKN 1 Bintan Timur
778	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	28.640,00	2007	JL. KORINDO. KM.21 RT 001 RW 002 KELURAHAN SEI LEKOP KECAMATAN BINTAN TIMUR, Sungai Lekop, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan Prov. Kepulauan Ri	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.01.000002642.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	587.142.857,00	Dinas Pendidikan	Bintan	SMAN 1 BINTAN TIMUR
779	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	1.505,00	12-Aug-93	Jalan Pramuka no 7B sei harapan sekupang Batam					Hibah	1.239.090.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Batam	
780	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0378	6.049,00	44951	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	12-Apr-23	32.01.08.05.4.00043	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	350.789.286,67	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
781	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0379	1.585,00	44978	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	12-Apr-23	32.01.08.05.4.00044	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	215.961.666,66	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
782	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0381	22.477,56	45047	Jl. Gurindam 12	NULL	NULL	NULL		Pembelian	16.518.908.550,76	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Jl. Gurindam 12
783	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0382	937,00	45163	Jalan Senggarang, Kota Tanjungpinang	Hak Pakai	6-Mar-23	SKT (surat keterangan tanah) 004/G-1/2023		Pembelian	98.000.200,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Jalan Senggarang, Kota Tanjungpinang
784	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0384	533,00	45069	Jalan Senggarang, Kota Tanjungpinang	Hak Pakai	10-Sep-08	SKGK No. 75/590/IX/2008		Pembelian	55.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Jalan Senggarang, Kota Tanjungpinang
785	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0002	20.800,00	09/02/2000	Jalan Pelabuhan Dabo Singkep	Hak Pakai	NULL	NULL		Pembelian	5.355.854.000,00	Dinas Perhubungan	Lingga	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
786	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	1.3.1.01.00 3.003.006	0001	728,00	41844	Jalan Pelabuhan Dabo Singkep	Hak Pakai	NULL	NULL		Pembelian	198.200.000,00	Dinas Perhubungan	Lingga	Lahan Kosong
787	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1.3.1.01.00 1.004.026	0002	5.000,00	37929	Jl. WISATA BAHARI KM. 50 (OBJEK	NULL	NULL	NULL		Pembelian	133.125.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Bintan	
788	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0004	0,00	2016	Tanjung Berlian Kundur Utara	Hak Pakai			Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	184.800.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	REKLAS DARI ASET LAIN-LAIN (PERSEDIAAN) - Penimbunan Lahan SMKN Persiapan Tanjung
789	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0005	0,00	2017	-					Pembelian	319.909.000,00	Dinas Pendidikan	Bintan	Pematangan Lahan Untuk SMA di Kelong Kec. Bintan Pesisir (SMAN 2 Bintan Pesisir)
790	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0008	0,00	2017	-				Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (kapitalisasi)	Pembelian	213.398.000,00	Dinas Pendidikan	Bintan	Pemasangan Paving Blok di SMAN 1 Bintan Timur

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
791	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0011	0,00	2018	SLB di Anambas DESA ARUNG HIJAU KAB.ANAMBAS					Pembelian	186.836.000,00	Dinas Pendidikan	Anambas	Pematangan Lahan dan Pemasangan Batu Miring SLBN Anambas
792	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0012	0,00	2019	-					Pembelian	162.701.253,00	Dinas Pendidikan	Batam	Pematangan Lahan SMAN 21 Batam
793	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001		30-Dec-22						Pembelian	186.142.540,00	Dinas Pendidikan		
794	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001		30-Dec-22						Pembelian	186.159.931,00	Dinas Pendidikan		
795	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001		30-Dec-22						Pembelian	185.764.569,00	Dinas Pendidikan		
796	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	2.086,00	2023	Jl. S. Parman Keluarahan Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk Kota Batam					Pembelian	11.654.200,0000	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 9 BATAM
797	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	1.011,00	2023	Jl. S. Parman Keluarahan Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk Kota Batam					Pembelian	6.601.700,0000	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 9 BATAM
798	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	16.490,00	2024	Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau	Hak Pakai	11-Jun-24	NIB. 32.06.000000160.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	117.903.500,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 1 SINGKEP SELATAN
799	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	7.345,00	2024	Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau	Hak Pakai	11-Jun-24	NIB. 32.06.000000167.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	52.516.750,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMA N 1 SINGKEP PESISIR
800	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	13.185,00	2024		Hak Pakai			Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	32.303.250,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMKN 1 Kundur Utara
801	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	6939	2024		Hak Pakai	7-Jan-20	32.04.01.05.4.00022 (6939 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	249.804.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMKN 2 Bunguran Timur
802	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	2.505,00	2024	KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA KARIMUN Desa/Kelurahan Sungai Raya, Kec.				Pemerintah Kabupaten Karimun	HIbah	266.254.082,0000	Badan Pendapatan Daerah	Karimun	KPPD Karimun
803	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	1.3.1.01.01.04.999	0001	39,97	2024	Desa/Kelurahan Sungai Enam, Kec. Bintan Timur, KABUPATEN BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU					HIbah	1.059.261.600,0000	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Bintan	Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bintan BAST Nomor:B/898/032/IX2024 Nomor: B/032.3/842.1/BKAD-SET 2024 Tanggal 13 September 2024 NPHD Nomor:B/897/032/IX/2024 Nomor:B.032.3/841.1/BKAD-SET/2024 Tanggal 13 September 2024
804	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001		2024		Hak Pakai		Sertipikat Hak Pakai NIB. 32.01.000002282.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	HIbah	282.922.880,0000	Dinas Pendidikan	Bintan	SLBN Kijang
805	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	10000	2005	Jln. Pantai Indah RT 01, RW 09 Kel. Tanjung Uma Kec.		-	-		HIbah	7.502.000.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 12
806	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	552,5	2008	Jl. Tamalatea Kel. Tg. Sengkuang Kec Batu Ampar		-	-		HIbah	337.577.500,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 14
807	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	10000	2001	Jl. Rajawali Kel. Belian Kec. Batam Kota		_	_		HIbah	8.522.000.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 3 Batam
808	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	1.593,00	2002	tiban lama		-	-		HIbah	1.593.000.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 4 Batam

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
809	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	48,00	2004	tiban lama		-	-		HIbah	48.000.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 4 Batam
810	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	68,00	2011	tiban lama		-	-		HIbah	68.000.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 4 Batam
811	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	538,00	2011	tiban lama		-	-		HIbah	538.000.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 4 Batam
812	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	10.125,70	2008	Tiban II, kel.patam lestari, Kec.Sekupang Batam		-	-		HIbah	5.285.615.400,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMK Negeri 4
813	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	3.07	2015			-	-		HIbah	221.564.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 7 Batam
814	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	13.230,00	2015			-	28020721		HIbah	219.065.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 5 Batam
815	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	5509	31/12/2019	Fasum Tanjung Buntung			32.02.000056783.4		HIbah	188.400.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 25 Batam
816	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	3000	31/12/2015	Lahan Fasum Legenda Malaka					HIbah	183.700.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 20 Batam
817	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	1055	2020	Autis Centre		22-Jun-20	22.096.090.377.001		HIbah	1.493.880.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	Autis Centre
818	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	2159	2020	Sekolah Luar Biasa		22-Jun-20	22.096.090.377.002		HIbah	3.057.144.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	Sekolah Luar Biasa
819	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	10843	2021	SMAN 20 Batam		22-Jun-21	22.096.090.377.003		HIbah	15.353.688.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 20 Batam
820	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	9.157,00	2025		Hak Pakai	22-Jul-25	NIB.32.03.000006136.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	2.206.837.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 1 Selat Gelam
821	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	5.626,00	2025	Tebang	Hak Pakai	22-Sep-22	32.07.02.02.4.00230	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	19.691.000,00	Dinas Pendidikan	Anambas	SMAN 1 Palmatak
822	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	7.771,00	2025	Mubur	Hak Pakai	23-Sep-22	32.07.02.01.4.00169	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	13.210.700,00	Dinas Pendidikan	Anambas	SMAN 2 Palmatak
823	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	10.198,00	2025		Hak Pakai	2025	NIB.32.06.000005048.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		61.188.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 1 Pulau Posek
824	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	7.482,00	2025		Hak Pakai	2025	NIB.32.02.000057787.4	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		7.721.424.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 27 Batam
825	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	9.989,00	2025		Hak Pakai	2025	NIB.32.02.000056746.4	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		10.308.648.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 10 Batam
826	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	4.962,00	2025		Hak Pakai	2025	NIB.32.02.000056752.4	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		5.120.784.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 11 Batam
827	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.250,75	2025	Desa Tanjung Batang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna					Hibah	10.000.000,0000	Dinas Pendidikan	Natuna	USB SMAN
828	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.3.1.01.00 2.002.002	0001	15950.00	2025	Monumen Tugu Bahasa Nasional di Pulau Penyengat Desa/Kelurahan Penyengat, Kec. Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau		12-Dec-25			Hibah	159.500.000,0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Monumen Rugu Bahasa
												1.187.619.664.254,1100			

DAFTAR TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU YANG BERUPA BIDANG TANAH
BERSERTIPIKAT A.N. PEMEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAMPIRAN 5B

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	897,00	2014	Jakarta Desa/Kelurahan Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA	Hak Pakai	5-Mar-15	HP. 09.01.06.01.4.00428 (897 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	29.600.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Jakarta	Kantor Penghubung Jakarta
2	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0001	16.000,00	2018	Jalan Adisucipto, Tanjungpinang	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.02.01.4,00196, (5.213 m2) 32.05.02.01.4.00197 (2.549 m2) 32.05.02.01.4.00198 (1.163 m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	9.517.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	jalan adi sucipto
3	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0003	9.002,00	2018	Jalan Bakar Batu, Tanjungpinang	Hak Pakai	24-Sep-19	32.05.01.01.4.00875 (9.002 m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	12.568.584.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Jalan Bakar Batu
4	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0004	13.280,00	2018	Jalan Brigjen Katamso, Tanjungpinang	Hak Pakai	24-Sep-19	32.05.04.02.4.00206 (13.280 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	47.131.461.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	JALAN BRIGJEN KATAMSO
5	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0006	7.334,00	2018	Jl. Dr. SUtomo	Hak Pakai	20-Dec-19	32.05.03.04.4.00036 (7.334 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	13.869.030.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	SUTOMO
6	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0007	21.341,00	2018	Jalan Gatot Subroto, Tanungpinang	Hak Pakai	8-Dec-20	32.05.02.02.4.00028 (21.341 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	30.736.650.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Jalan gatot subroto
7	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0009	8.230,00	2018	Jalan Ir Sutami, Tanjungpinang	Hak Pakai	10-Sep-21	32.05.04.01.4.00128 (8.230 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	42.235.536.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	JALN IR SUTAMI
8	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0010	15.513,00	2018	Jalan MT Haryono, Tanjungpinang	Hak Pakai	24-Sep-19	32.05.04.02.4.00205 (15,513 m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	35.290.640.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Jalan MT haryono
9	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0012	6.350,00	2018	Jalan RE Martadinata, Tanjungpinang	Hak Pakai	24-Sep-19	32.05.02.02.4.00027 (6.350 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	6.459.460.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	R.E MARTADINATA
10	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0013	4.620,00	2018	Jalan Sunaryo, Tanjungpinang	Hak Pakai	20-Nov-19	32.05.03.04.4.00034 (4.620 m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	11.474.232.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	jalan sunaryo
11	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0014	8.725,00	2018	Jalan Tugu Pahlawan, Tanjungpinang	Hak Pakai	20-Dec-19	32.05.03.04.4.00035 (8.725 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	30.885.462.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	JALAN TUGUH PAHLAWAN
12	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0015	49.020,00	2018	Jalan Wiratno Pulau Dompak Tanjungpinang	Hak Pakai	20-Dec-19	32.05.03.03.4.00032 (49.020 m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	58.396.538.800,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	JALAN WIRATNO
13	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0016	65.110,00	2018	Jalan WR. Supratman, Tanjungpinang	Hak Pakai	24-Sep-19	32.05.02.05.4. 00046 (65.110 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	64.703.639.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	JALAN WR SUPRATMAN
14	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0017	16.320,00	2018	Jl. Nusantara Batas Kota, Tanjungpinang	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.02,05.4.00244 (13.745 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	3.278.366.700,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	BADAN JALAN NUSANTARA
15	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0021	35.000,00	2020	Jalan Sei Nam Laut	Hak Pakai	23-Sep-22	32.01.01.04.4.00014	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	805.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
16	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0093	161,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	95.832.828,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Netti Erwanti No Bidang 63 SHM No.00344
17	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0094	160,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	88.934.862,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Raisal Phait No Bidang 68 SHM No.00349
18	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0095	160,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	88.934.862,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Tanjung Permai Kab. Bintan
19	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0096	24,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.06.04.4.00004	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	30.968.236,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Junaidi. D No.Bidang 55 Reg No.265/SKL/2020

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
20	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0097	10,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	14-Apr-22	32.01.08.05.4.00006	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	23.567.711,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Zanimar No Bidang 80 SHM No.00358
21	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0098	627,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00010	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	88.345.804,46	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Armi Nasution No.Bidang 15 No.582/BU/1993
22	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0099	33,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	14-Apr-22	32.01.08.05.4.00006	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	21.958.318,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Sri Sudaryanti No Bidang 78 SHM No.00361
23	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0100	160,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	90.232.727,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Netti Erwanti No Bidang 64 SHM No.00345
24	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0101	176,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	97.899.975,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Toni Wijaya No Bidang 69 SHM No.00351
25	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0102	769,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00002	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	26.979.036,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Syofyan Rida No. Bidang 37 SHM No.00769
26	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0103	1.480,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00013	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	759.405.136,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.TANDY WINNERLY No Bidang 44 Kuasa Menjual No.2
27	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0230	1.135,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00009	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	158.837.790,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Syamsuddin No Bidang 26 SHM No.00820
28	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0231	480,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00009	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	67.947.532,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Berta Yudhi Kusumawardana No Bidang 28 SHM No.00818
29	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0232	1.677,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	13-May-22	32.01.08.05.4.00015	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	100.740.464,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Hamidah No.Bidang 81
30	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0233	1.294,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00009	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	174.797.870,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Saifuddin No.Bidang 29
31	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0234	2.299,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00007	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.105.537.735,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Suhirman No.Bidang 71 Reg No.42/SKL/2020
32	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0236	-	2021	Tg.Uban Selatan	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00009	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	27.737.746,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Sifuddin No.Bidang 25 Reg No.56/SKL/2019
33	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0237	1.702,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00013	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	818.669.035,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Suhirman No.Bidang 121
34	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0238	14.109,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	13-May-22	32.01.08.05.4.00015	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	804.118.098,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Suhirman No.Bidang 121
35	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0239	839,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	13-May-22	32.01.08.05.4.00014	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	50.667.624,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT.Citra Inti Cakrawala Bintan No.Bidang 93
36	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0240	1.425,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	13-May-22	32.01.03.03.4.00022	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	98.145.663,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT.Citra Inti Cakrawala Bintan No.Bidang 95
37	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0241	3.291,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	13-May-22	32.01.08.05.4.00015	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	194.478.298,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT.Citra Inti Cakrawala Bintan No.Bidang 90
38	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0242	2.448,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	13-May-22	32.01.08.05.4.00015	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	149.872.790,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT.Citra Inti Cakrawala Bintan No.Bidang 90
39	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0243	3.862,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.03.03.4.00023	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	399.718.786,96	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT.Citra Inti Cakrawala Bintan No.Bidang 101
40	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0244	150,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	14-Apr-22	32.01.08.05.4.00006	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	83.426.292,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Desi Sutriani No Bidang 74 SHM No.00357
41	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0245	150,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	14-Apr-22	32.01.08.05.4.00006	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	66.050.321,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Desi Sutriani No Bidang 77 SHM No.00354
42	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0246	444,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	317.891.236,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Sugiono No Bidang 53 SHM No.00599

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
43	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0247	1.935,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00013	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	930.629.736,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Abdul Rachman Julianto No Bidang 43 SHM No.00855
44	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0248	3.529,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00009	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	470.836.592,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Witono No.Bidang 30 Reg No.639/BU/1994
45	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0249	2.049,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00011	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	274.647.435,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Hartono No.Bidang 11 SHM No.898
46	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0250	18.598,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00011	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	3.164.767.221,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Hartono No.Bidang 9 SHM No.894
47	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0251	884,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00013	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	426.605.435,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Yosse Adrian No.Bidang 117
48	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0252	875,00	2021	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Fetty Fatimah No.Bidang 120	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00013	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	421.281.735,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Fetty Fatimah No.Bidang 120
49	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0253	656,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	13-May-22	32.01.08.05.4.00015	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	41.785.517,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Fetty Fatimah No.Bidang 120
50	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0254	1.302,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00011	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	176.754.537,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Hartono No.Bidang 13
51	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0255	261,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	14-Apr-22	32.01.08.05.4.00006	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	154.192.390,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.James Winter Pasaribu No Bidang 75 SHM No.00355
52	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0256	6.047,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	13-May-22	32.01.08.05.4.00015	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	689.245.660,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Wan Zakir No Bidang 56 SHM No.00340
53	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0257	1.149,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00011	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	557.525.411,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Huang Huang No Bidang 4 SHM No.02396
54	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0258	346,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	205.220.666,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Sumarno No Bidang 62 SHM No.00343
55	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0259	2.198,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00005	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	282.475.136,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Sudarso No.Bidang 40 Register.266/SKL/2020
56	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0260	12.662,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	13-May-22	32.01.08.05.4.00015	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	721.626.575,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT.Citra Inti Cakrawala Bintan No.Bidang 92
57	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0261	9.109,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	13-May-22	32.01.08.05.4.00015	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	519.074.823,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT.Citra Inti Cakrawala Bintan No.Bidang 83
58	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0262	3.570,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	13-May-22	32.01.08.05.4.00015	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	210.983.917,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT.Citra Inti Cakrawala Bintan No.Bidang 85
59	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0263	66,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.03.03.4.00023	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	27.393.781,96	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Mustika Adjie No.Bidang 99 Reg No.33/BU/2016
60	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0264	3.665,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.03.03.4.00023	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	355.790.882,96	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT.Citra Inti Cakrawala Bintan No.Bidang 98
61	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0265	7.074,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	13-May-22	32.01.08.05.4.00015	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	410.671.252,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT.Citra Inti Cakrawala Bintan No.Bidang 82
62	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0266	10.701,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	13-May-22	32.01.08.05.4.00015	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	609.832.602,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT.Citra Inti Cakrawala Bintan No.Bidang 87
63	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0267	155,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	13-May-22	32.01.08.05.4.00015	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	13.279.160,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT.Citra Inti Cakrawala Bintan No.Bidang 84
64	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0268	332,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	197.640.971,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Elisa Novita No.Bidang 58 SHM No.00360

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
65	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0269	109,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	413.749.477,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Usaha An.Gulpan Harahap No.Bidang 67 SHM No.00572
66	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0271	7.481,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00011	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	3.014.235.450,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Yohanes Wendy Tjioe No.Bidang 7
67	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0272	1.707,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.03.03.4.00023	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	176.288.052,96	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Heryani No.Bidang 102 Reg No.31/BU/2016
68	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0273	271,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	345.412.336,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Andy Sulistio No.Bidang 50 SHM No.00544
69	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0274	1.939,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00005	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	249.287.436,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Asbanir No.Bidang 41
70	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0275	3.030,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00008	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	389.086.036,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Hok Hie No.Bidang 36
71	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0276	32,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00013	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	9.209.035,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Yosse Adrian No.Bidang 115
72	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0277	267,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	646.966.588,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Rully Perlindo No.Bidang 59 SHM No.00359
73	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0279	1.104,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.03.03.4.00023	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	120.921.402,96	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	17488/SP2D/1.03.01.01/2021
74	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0280	2.052,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.468.905.836,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Andy Sulistio No.Bidang 52 SHM No.00550
75	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0281	300,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	215.458.929,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Yuni Alvia Siregar No Bidang 51 SHM No.00543
76	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0282	1.162,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.03.03.4.00023	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	115.024.792,96	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Maziah No.Bidang 103 Reg
77	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0283	926,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00011	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	662.785.450,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Eric Sulendra No.Bidang 5
78	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0284	213,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	14-Apr-22	32.01.08.05.4.00006	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	126.710.067,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Minda Suriyanti No.Bidang 76 SHM No.00362
79	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0285	186,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	110.220.583,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Durminta Pitriawaty Br Tampubolon No Bidang 66 SHM No.00346
80	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0286	4.921,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00011	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.960.175.071,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Yohanes Wendy Tjioe No.Bidang 8
81	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0288	122,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	14-Apr-22	32.01.08.05.4.00006	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	411.942.593,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Usaha An.Pihdi No.Bidang 79 SHM No.00356
82	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0289	9.504,00	2021	Tg. Uban Selatan Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00011	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.228.141.581,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Hartono No.Bidang 12 SHM No.901
83	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0290	295,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	185.443.270,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Sunardi No.Bidang 60 SHM No.00352
84	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0291	321,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	251.367.721,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Sunardi No.Bidang 60 SHM No.00352
85	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0293	42.396,00	2021	Batam	Hak Pakai	8 Juni 2022 8 Juni 2022	00074 (29.380m2) 00075 (13.016 m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	523.226.823,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Batam	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT. JAYA INDUSTRI MAKMUR No. Bidang 2
86	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0294	122.689,00	2021	Kelurahan Ngenang, Kota Batam	Hak Pakai	8-Jun-22	00076 (122.689m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	723.421.823,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Batam	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT. JAYA INDUSTRI MAKMUR

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
87	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0296	1.024,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00013	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	492.877.935,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Abdul Rachman Julianto No Bidang 118 SHM No.00855
88	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0297	1.609,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00013	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	773.980.835,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Abdul Rachman Julianto No Bidang 119 SHM No.00855
89	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0306	1.548,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.06.04.4.00003	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	216.235.235,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Muthia Rasyiahana No.Bidang 122
90	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0307	38.049,00	2021	Kelurahan Ngenang, Kota Batam	Hak Pakai	8-Jun-22	00077 (38.049m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	658.138.823,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Batam	KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI - Ganti Rugi Kerugian Tanah An.PT.TEMBESI JAYA MAKMUR
91	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0309	784,00	2021	Tanjung Permai Kab. Bintan	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00009	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	110.131.713,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Eko Purwanto No Bidang 27 SHM No.00819
92	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0310	861,00	2021	Jalan Indun Suri Kelurahan Tanjung Permai Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	12-Jul-22	32.01.08.05.4.00024	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	86.599.355,96	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An. Effendi Hidayat No. Bidang 22 Sertifikat Hak Milik No. 00482
93	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0311	18,00	2021	Tanjung Uban, Bintan Kepulauan Riau	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00010	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	16.072.731,46	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
94	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0312	282,00	2021	Tanjung Uban, Bintan Kepulauan Riau	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00010	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	187.487.931,46	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
95	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0313	422,00	2021	Tanjung Uban, Bintan Kepulauan Riau	Hak Pakai	7-Apr-22	32.01.08.05.4.00010	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	93.795.331,46	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
96	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0314	1.784,00	2021	Tanjung Uban, Bintan Kepulauan Riau	Hak Pakai	12-Jul-22	32.01.08.05.4.00024	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	318.196.110,78	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
97	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0315	580,00	2021	Tanjung Uban, Bintan Kepulauan Riau	Hak Pakai	12-Jul-22	32.01.08.05.4.00024	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	106.496.263,14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
98	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0317	217,00	2021	Tanjung Uban, Bintan Kepulauan Riau	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.08.05.4.00020	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	43.198.813,96	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
99	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0319	4.164,00	2021	Tanjung Uban, Bintan Kepulauan Riau	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00013	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	2.139.411.403,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
100	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0320	261,00	2021	Tanjung Uban, Bintan Kepulauan Riau	Hak Pakai	18-Apr-22	32.01.08.05.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.083.446.850,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
101	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0321	2.697,00	2021	Tanjung Uban, Bintan Kepulauan Riau	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.03.03.4.00023	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	255.294.634,48	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
102	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0322	9.578,00	2021	Tanjung Uban, Bintan Kepulauan Riau	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.03.03.4.00023	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	878.427.494,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
103	Tanah Bangunan Terminal Laut	1.3.1.01.00 1.002.008	0001	2.206,00	2017	Pelabuhan Bongkar Muat Kota Segara Mentigi, Tanjung Uban, Bintan-Kepulauan Riau	Hak Pakai	4-Dec-19	32.01.03.01.4. 00195	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.611.374.367,00	Dinas Perhubungan	Bintan	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA PELABUHAN BONGKAR MUAT TANJUNG UBAN
104	Tanah Bangunan Terminal Laut	1.3.1.01.00 1.002.008	0002	5.548,00	2017	Pelabuhan Bongkar Muat Kota Segara Mentigi, Tanjung Uban, Bintan-Kepulauan Riau	Hak Pakai	6-Dec-19	32.01.03.01.4. 00196	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	797.279.367,00	Dinas Perhubungan	Bintan	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA PELABUHAN BONGKAR MUAT TANJUNG UBAN
105	Tanah Bangunan Terminal Laut	1.3.1.01.00 1.002.008	0003	2.608,00	2019	Pelabuhan Bongkar Muat Kota Segara Mentigi, Tanjung Uban, Bintan-Kepulauan Riau	Hak Pakai	6-Sep-21	32.01.03.01.4.00236	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	830.523.366,00	Dinas Perhubungan	Bintan	Pengadaan tanah untuk pelabuhan bongkar muat tanjung uban Pelabuhan Bongkar Muat

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
106	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0010	18.030,00	2017	Tebing	Hak Pakai	20-Sep-17	32.03.05.01.4.0092	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	3.811.542.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 5 Karimun
107	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	58.453,00	1979	Jl. Sutan Sulaiman, Tanjungpinang	Hak Pakai	20-Oct-22	32.05.02.02.4.00070 (57.900 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	64.397.300,00	Dinas Pendidikan	Tanjungpinang	SMKN 3 Tanjungpinang
108	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.400,00	1999	JALAN PENDIDIKAN LAYANG KOBEL	Hak Pakai	22-Sep-22	23.03.08.03.4.00010	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	1.122.000.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 4 KUNDUR SAWANG
109	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	12.898,20	1999	JALAN PULAU PASUNG	Hak Pakai	19-Sep-22	32.03.11.02.4.00001	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	77.389.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 5 KUNDUR
110	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.800,00	1999	JALAN MANUNGGAL BUKIT RANGGAM	Hak Pakai	12-Nov-19	32,03,12,03,4,00001	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	166.400.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 6 KUNDUR
111	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	16.000,00	1999	JALAN BESAR SAWANG	Hak Pakai	30 Juni 2020 16 Juni 2019	32.00006 (134 m2), 00005 (12.880m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	176.000.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMKN KUNDUR
112	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	10.000,00	2005	Jl.Raja Ali Haji, Desa Sungai Harapan, Kec Singkep Barat Kab.Lingga	Hak Pakai	20-Sep-22	32.06.05.08.4.00009 (44100m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	537.640.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 1 SINGKEP BARAT
113	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	11.250,00	2011	Jl.Sungai Tumu RT.08/RW.04, Desa Penuba, Kec.Selayar, Kab.Lingga	Hak Pakai	20-Sep-22	32.06.09.02.4.00094 (22800m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	386.629.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 3 LINGGA (SMAN 3 Penuba)
114	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	13.832,00	2012	Dus II Mulyasari Desa Bukit Langkap	Hak Pakai	11-Jun-24	32060000001640 (30590m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	42.845.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMKN 1 LINGGA
115	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0004	4.300,00	2013	Dus II Mulyasari Desa Bukit Langkap	Hak Pakai	11-Jun-24	32060000001640 (30590m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	5.777.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMKN 1 LINGGA
116	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	8.783,00	2014	Jl.Batin Encik Muhammad Saleh RT.03/RW.05, Desa Sungai Pinang, Kec.Lingga Timur Kab.Lingga	Hak Pakai	23-Dec-19	32.06.08.05.4.00015 (8783 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	339.511.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 2 LINGGA sekarang berubah menjadi SMAN 1 Lingga Timur
117	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	17.401,00	2016	Jl. Kukang Desa Duara, Kecamatan Lingga Utara	Hak Pakai	21-Sep-22	32.06.04.03.4.00379 (15190m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	40.000.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 1 LINGGA UTARA
118	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	14.148,00	2008	Jln. Jankang Hijau, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep	Hak Pakai	11-Jun-24	NIBEL 32060000001680 (14000m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	403.897.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMKN 1 SINGKEP
119	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	37.500,00	2012	Dus II Mulyasari Desa Bukit Langkap	Hak Pakai	11-Jun-24	32060000001640 (30590m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	60.695.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMKN 1 LINGGA
120	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	1.030,00	2016	Jl.Benan Dusun I RT 001/RW 001 Desa Benan Kec.Senayang	Hak Pakai	22-Dec-19	32.06.11.01.4.00211 (1030 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	196.580.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 2 SENAYANG/Perpustakaan nya saja sekarang namanya SMAN 1 Katang Bidare
121	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	30.000,00	2008	Jl. Raja Ali Haji, Kec. Singkep Barat	Hak Pakai	20-Sep-22	32.06.05.08.4.00009 (44100m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	136.023.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 1 SINGKEP BARAT
122	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0003	8.360,00	2012	Dus II Mulyasari Desa Bukit Langkap	Hak Pakai	11-Jun-24	32060000001640 (30590m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	34.693.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMKN 1 LINGGA
123	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	17.667,00	2008	Pulau Sebangka, Kec. Senayang	Hak Pakai	11-Jun-24	NIBEL 32060000001780 (29160 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	968.625.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMKN 001 SENAYANG
124	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	14.750,00	2011	Jl.Sungai Tumu RT.08/RW.04, Desa Penuba, Kec.Selayar, Kab.Lingga	Hak Pakai	20-Sep-22	32.06.09.02.4.00094 (22800m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	514.805.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 3 LINGGA SELAYAR
125	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	12.083,00	2008	Jl. Pelajar No. 04, Dabo Singkep, Kec. Singkep	Hak Pakai	15-Dec-24	NIB 32.06.000003716.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	732.059.000,0000	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 1 Singkep

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
126	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	5.342,00	2011	Jl.Benan Dusun I RT 001/RW 001 Desa Benan Kec.Senayang	Hak Pakai	22-Dec-19	32.06.11.01.4.00212 (5342 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	1.008.662.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 002 SENAYANG/ bangunan sekolahnya sekarang namanya SMAN 1 Katang Bidare
127	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	19.340,00	2008	Jl. Istana Robat, Kelurahan Daik, Kecamatan Lingga	Hak Pakai	4 May 2202 27 May 2022	32.06.02.01.4.00050 (631 M2) 32.06.02.01.4.00051 (9530 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	4.564.303.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 1 LINGGA
128	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	30.000,00	2008	Jl. Samudra, Kp. Baru Senayang. Kec. Senayang	Hak Pakai	23-Dec-19	32.06.03.01.4.00285 (632 M2) NIBEL 32060000001760 (5595 M2) NIBEL 32060000001770 (9912 m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	780.000.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 001 SENAYANG HARUSNYA 2 BIDANG KARENA SEKOLAH DAN RUMAH DINAS TERPISAH CUKUP JAUH
129	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	15.418,00	2010	Jl. Gudang Tengah RT 01/RW II Rintis, Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten kepulauan Anambas	Hak Pakai	23-Sep-22	32.07.01.03.4.00029 (6416m2) 32.07.01.03.4.00030 (2200m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	253.680.000,00	Dinas Pendidikan	Anambas	SMAN 1 Siantan
130	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	7.695,00	2013	Jl. H. Ali No.38 Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah	Hak Pakai	22-Sep-22	32.07.07.01.4.00178 (8318m2	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	100.000.000,00	Dinas Pendidikan	Anambas	SMKN 1 Anambas
131	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	3.115,00	2017	Jl. Patimura Pering-Bandarsyah, Ranai, Indonesia	Hak Pakai	5-Apr-08	32.04.01.08.4.00005 (3.115 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	358.054.067,14	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 2 Bunguran Timur
132	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0001	416,00	2006	Jl. Sumatera, Tanjungpinang	Hak Pakai	23-Sep-11	32.05.01.01.4.00069 (416 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	873.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Tanjungpinang	KANTOR UPT BADAN PP JAL RIAU
133	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0001	465,00	2006	Jl. Sumatera, Tanjungpinang	Hak Pakai	23-Sep-11	Nomor 32. 05.01,01.4.00070 (465.M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	880.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Tanjungpinang	KANTOR UPT BADAN PP JAL RIAU
134	Tanah Bangunan Bangunan Pembibitan	1.3.1.01.00 1.004.013	0002	300.000,00	2008	Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun	Hak Pakai	19-Sep-22	32.03.08.02.4.00006	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.200.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	Karimun	Tanah pembibitan Sawang
135	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1.3.1.01.00 1.001.004	0001	12.336,00	2005	Jln. Hang Tuah	Hak Pakai	4-Mar-20	32.05.01.01.4.00138 (12.336 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	6.090.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Gedung Daerah
136	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0039	30.058,00	2005	Jln. D.I Panjaitan	Hak Pakai	5-Apr-83	1694/83/594,3/TPI (20.000 m2) 04.53.03.04.4.00025 (10.058 m2)	Balai Latihan Kerja Industri Pertanian Dirjen Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja di Tanjungpinang dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	125.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU
137	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	1.3.1.01.00 1.004.004	0001	2.550,00	2006	Pulau Penyengat Tanjungpinang	Hak Pakai	4-Mar-19	32.05.01.02.4.00003 (2.550 m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	1.275.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	penyengat
138	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	449,00	2006	Jl. Kijang Tg Pinang	Hak Pakai	4-Dec-19	32.01.01.03.4. 00005	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	170.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Bintan	Mako Pulhut
139	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0004	788,00	2006	Jlan Sulaiman <Riau	Hak Pakai	7-Sep-22	32.05.03.01.4.00199 (724 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	1.576.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Ex Kantor Perikanan Jln Sulaiman, Jln Riau.
140	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0005	1.332,00	2006	Jl. St. Mahmud No. 13 Tanjungpinang	Hak Pakai	8-Sep-22	32.05.04.02.4.00302 (M 1.277 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	1.998.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Upt Perikanan ,Labour
141	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0006	1.820,00	2006	Jl. Tugu Pahlawan TPI	Hak Pakai	22-Mar-21	32.05.03.01.1.00156 (1.820m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	6.915.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tanjungpinang	Kantor BPBD

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
142	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0009	4.521,00	2006	Jl. Desa Kawal	Hak Pakai	9-Dec-19	32.01.0501..4. 00081	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	1.250.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Bintan	KAWAL 5 UNIT RUMAH DINAS
143	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0010	894,00	2006	Jl. Desa Gunung Kijang, Kawal	Hak Pakai	30-Dec-19	32.01.05.01.4.00084	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	175.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Bintan	TANAH BANGUNAN PAUD
144	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0011	640,00	2006	Jl. Desa Kawal	Hak Pakai	4-Dec-19	32.01.05.01.4.00080	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	437.500.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Bintan	KAWAL TK TUNAS MUDA
145	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0014	6.873,00	2006	Jl. Pemuda, Tanjungpinang	Hak Pakai	7-Sep-22	32.05.04.03.4.00153	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	3.582.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Asrama Haji Tanjungpinang
146	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0017	3.153,00	2006	Jl. Sunaryo Batu 4 kel Tg Batu Barat	Hak Pakai	19-Sep-22	32.03.02.01.4.00012	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	1.418.850.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Karimun	Rumah dinas jalan sunaryo
147	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0018	465,00	2006	Jl. Desa Tg.Batu Kec.Kundur	Hak Pakai	19-Sep-22	32.03.02.02.4.00075	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	1.576.500.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Karimun	Rumah dinas jalan sudirman
148	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0020	7.562,00	2006	Jl. Yakkop, Kelurahan Air Mali, Kecamatan Bunguran Utara-Natuna	Hak Pakai	14-Feb-22	32.04.09.03.4.00069 (7.562 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	4.500.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Natuna	TANAH BANGUNAN KEL AIR MALI BUNGURAN UTARA
149	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0021	4.571,00	2006	Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur - Natuna	Hak Pakai	18-Mar-22	32.04.01.09.4.00007 (4.571.M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	1.188.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Natuna	TANAH BANGUNAN KANTOR JALAN YOSUDARSO BATU HITAM
150	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0023	4.510,00	2006	Jl. Desa Jemaja Kec.Jemaja	Hak Pakai	22-Sep-22	32.07.06.08.4.00224 (4246m2	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	789.250.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Anambas	
151	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0024	500,00	2006	Jl.Kobat	Hak Pakai	20-Sep-22	32.06.02.01.4.00079 (550 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	125.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Lingga	RUMAH DINAS JALAN KOBAT/Alih Media
152	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0032	1.200,00	2006	Jl. Bukit Cengkeh	Hak Pakai	20-Sep-22	32.06.02.01.4.00080 (1418 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	180.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Lingga	TANAH BANGUNAN KANTOR
153	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0033	1.200,00	2006	Jl. Kartini	Hak Pakai	20-Sep-22	32.06.01.01.4.00264 (2466 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	180.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Lingga	RUMAH DINASJALAN KARTINI SINGKEP
154	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0034	4.492,00	2006	Dompak Seberang Tanjung Pinang	Hak Pakai	19-Jun-19	32.05.04.05.4.0030 (4.492 m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	15.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Upt Perikanan Sebelah Pelabuhan Roro
155	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0169	8.612,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P3	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	37.462.200,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
156	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0174	19.789,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P13	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00071	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	65.303.700,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 1
157	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0175	2.488,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P14	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00071	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	8.210.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 1
158	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0176	14.361,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P15	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	57.444.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
159	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0177	9.730,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P16	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	48.650.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
160	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0181	39.196,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P20	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	137.186.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
161	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0182	38.299,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P21	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	172.345.500,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
162	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0184	25.946,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P23	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	106.378.600,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
163	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0185	14.982,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P25	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	63.673.500,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
164	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0186	7.920,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P26	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	33.660.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
165	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0187	12.867,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P27	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	54.684.750,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
166	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0188	5.684,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P28	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	24.157.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
167	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0189	4.276,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P29	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	18.173.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
168	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0190	5.622,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P30	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	18.693.500,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
169	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0191	14.111,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P31	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	59.971.750,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
170	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0192	11.956,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P32	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	50.813.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
171	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0193	8.129,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P33	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	34.548.250,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
172	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0194	20.012,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P34	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	80.048.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
173	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0195	69.196,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P35	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	276.784.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
174	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0196	5.506,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P36	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	16.518.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
175	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0197	122.697,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P37	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	487.298.250,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
176	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0198	9.981,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P38	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	42.918.300,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
177	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0199	32.130,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P39	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	106.029.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
178	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0200	54.163,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P40	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	178.737.900,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
179	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0203	72.454,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P44	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	304.306.800,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
180	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0206	11.399,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P48	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	34.766.950,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
181	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0207	73.591,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P49	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	240.483.550,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
182	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0208	21.514,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P50	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	86.056.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
183	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0209	26.385,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P51	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	9.099.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
184	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0210	17.008,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P52	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	68.032.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
185	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0220	4.002,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P62	Hak Pakai	16-Dec-20	32.05.04.05.4.00052	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	16.008.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
186	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0222	9.400,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P64	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	37.600.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
187	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0223	10.116,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P65	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	40.464.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
188	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0224	19.905,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P66	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	59.715.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
189	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0225	9.965,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P67	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	39.860.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
190	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0227	14.357,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P69	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	68.928.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
191	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0229	16.385,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P71	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	52.655.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
192	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0231	7.697,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P73	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	7.151.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
193	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0232	2.246,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P74	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	6.738.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
194	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0233	19.134,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P75	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	75.395.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
195	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0235	18.057,50	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P77	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	54.439.410,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
196	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0236	12.006,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P78	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	36.018.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
197	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0237	7.959,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P79	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	23.877.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
198	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0238	18.646,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P80	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	59.938.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
199	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0239	77.560,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P81	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	271.460.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
200	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0240	16.340,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P82	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	71.320.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
201	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0241	6.483,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P83	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	24.414.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
202	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0242	58.566,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P84	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	292.830.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
203	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0243	12.023,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P85	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	36.069.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
204	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0244	9.451,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P86	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	28.353.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
205	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0245	10.801,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P87	Hak Pakai	16-Dec-20	32.05.04.05.4.00052	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	43.204.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
206	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0246	62.602,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P88	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	262.908.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
207	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0249	6.242,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P92	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	9.955.807,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
208	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0250	30.820,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P93	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	61.448.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
209	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0251	14.046,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P94	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	64.034.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
210	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0252	20.028,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P95	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	80.112.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
211	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0253	14.791,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P96	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	59.164.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
212	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0253	10.832,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P97	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	12.552.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
213	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0254	19.375,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P98	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	87.642.132,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
214	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0255	9.432,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P99	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	28.296.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
215	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0101	25.318,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P 220	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073 NIB. 32.05.000001797.0 (13 Nov 24)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	113.272.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
216	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0100	2.504,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P 221	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	7.512.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
217	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0099	17.655,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P 266	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	141.807.440,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
218	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	15.459,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P 267	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	98.629.060,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
219	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	15.552,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P 268	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	101.722.030,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
220	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0104	141.490,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P 269	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021 / 32.05.04.05.4.00036	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	4.167.067.069,60	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
221	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0102	199.382,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P 270	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021 / 32.05.04.05.4.00036	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	9.324.487.056,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
222	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0256	9.896,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P100	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	29.688.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
223	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0257	13.403,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P101	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	60.696.719,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
224	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0258	26.276,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P102	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	132.612.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
225	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0259	108.985,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P103	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	792.233.603,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
226	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0260	21.225,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P104	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	63.675.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
227	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0262	4.498,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P106	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	13.494.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
228	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0263	20.073,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P107	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	60.219.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
229	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0264	7.795,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P108	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	45.090.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
230	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0265	10.925,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P109	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	32.775.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
231	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0266	2.314,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P110	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	6.942.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
232	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0267	26.184,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P111	Hak Pakai	16-Dec-20	32.05.04.05.4.00052	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	112.471.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
233	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0269	11.537,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P113	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	34.611.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
234	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0270	11.638,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P114	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	46.552.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
235	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0271	12.570,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P115	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	48.680.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
236	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0272	8.345,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P116	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	31.035.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
237	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0273	21.999,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P117	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	117.475.020,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
238	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0274	28.921,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P118	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	162.860.500,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
239	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0278	15.752,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P122	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	70.093.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
240	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0279	9.416,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P123	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	38.774.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
241	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0281	19.482,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P125	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	82.098.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
242	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0309	8.006,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P126	Hak Pakai	16-Dec-20	32.05.04.05.4.00052	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	24.018.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
243	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0282	18.180,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P127	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	72.720.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
244	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0284	27.494,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P129	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	66.083.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
245	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0288	10.257,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P133	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	30.771.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
246	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0289	15.644,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P134	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073 + blok 14	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	73.619.500,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
247	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0291	8.454,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P136	Hak Pakai	16-Dec-20	32.05.04.05.4.00052	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	42.955.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
248	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0293	26.721,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P138	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	87.621.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
249	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0294	12.877,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P139	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	51.508.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
250	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0295	19.998,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P140	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021 + Sisa Persil	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	75.349.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
251	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0296	16.916,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P141	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	91.992.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
252	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0298	58.086,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P143	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	337.432.864,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
253	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0299	210.604,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P144	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	884.480.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
254	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0303	6.253,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P148	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	25.012.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
255	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0306	542.148,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P151	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.076.140.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
256	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0307	509.923,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P152	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021 / 32.05.04.05.4.00036	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	2.037.061.736,74	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
257	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0308	20.968,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P153	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	62.904.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
258	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	3.631,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P154	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	10.893.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
259	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	40.911,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P155	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	122.733.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
260	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	12.314,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P156	Hak Pakai	08/11/2017 23/09/2022	32.05.04.05.4.00021 32.05.04.05.4.00068	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	49.256.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 10
261	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0311	27.475,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P158	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	127.785.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
262	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0312	9.364,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P159	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	55.681.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
263	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0313	10.371,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P160	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	41.484.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
264	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0314	19.230,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P161	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	94.387.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
265	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0317	119.672,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P164	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	528.919.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
266	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0319	9.927,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P166	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	39.708.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
267	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0321	6.249,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P168	Hak Pakai	16-Dec-20	32.05.04.05.4.00052	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	24.996.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
268	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0322	8.010,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P169	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	41.719.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
269	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0323	61.162,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P170	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	235.098.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
270	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0327	4.337,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P176	Hak Pakai	16-Dec-20	32.05.04.05.4.00052	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	28.879.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
271	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0328	1.340,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P177	Hak Pakai	29-Sep-22	32.05.04.05.4.00072	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	4.020.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 2
272	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0330	18.886,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P179	Hak Pakai	12/16/2020 23/09/2022	32.05.04.05.4.00052 32.05.04.05.4.00068	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	61.304.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 10
273	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0331	17.172,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P180	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	62.716.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
274	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0333	15.587,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P182	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	63.468.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
275	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0339	32.584,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P188	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	33.516.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
276	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0341	9.871,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P190	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	39.484.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
277	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0346	5.114,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P195	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	20.456.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
278	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0347	10.671,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P196	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	30.388.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
279	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0348	11.660,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P197	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	57.972.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
280	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0349	9.117,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P198	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	37.708.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
281	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0353	80.636,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P202	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	303.947.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
282	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0357	6.450,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P206	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	29.590.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
283	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0358	25.639,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P207	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	193.521.500,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
284	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0360	7.137,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P209	Hak Pakai	29-Sep-22	32.05.04.05.4.00072	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	290.395.990,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 2
285	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0361	5.399,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P210	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	17.202.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
286	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0362	102.696,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P211	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	476.291.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
287	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0363	5.553,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P212	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	16.659.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
288	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0364	11.136,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P213	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	44.578.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
289	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0367	3.258,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P216	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	86.917.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
290	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0369	12.355,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P218	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	168.928.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
291	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0079	42.781,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P222	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	201.280.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
292	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0078	15.802,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P223	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	63.208.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
293	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0069	25.931,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P225	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	96.545.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
294	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0070	6.959,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P232	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	27.836.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
295	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0067	3.682,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P233	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	14.728.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
296	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0065	6.928,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P237	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	29.964.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
297	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0064	4.728,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P239	Hak Pakai	29-Sep-22	32.05.04.05.4.00072	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	280.578.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 2
298	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0058	4.357,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P241	Hak Pakai	29-Sep-22	32.05.04.05.4.00072	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	90.386.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 2
299	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0042	2.942,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P245	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	8.826.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
300	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0056	9.389,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P246	Hak Pakai	29-Sep-22	32.05.04.05.4.00072	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	199.861.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 2
301	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0044	9.937,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P248	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	93.833.770,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
302	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0047	6.664,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P251	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	19.992.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
303	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0049	1.195,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P253	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	84.217.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
304	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0052	2.917,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P256	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	8.751.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
305	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0053	50.380,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P257	Hak Pakai	16-Dec-20	32.05.04.05.4.00052	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	151.140.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
306	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0055	15.759,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P259	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	81.991.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
307	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0114	10.021,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P260	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	30.063.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 7
308	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0115	14.802,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P261	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	44.406.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
309	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0113	16.648,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P262	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021 NIB. 32.05.000003025.0 (13 Nov 24)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	49.944.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
310	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0116	10.088,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P263	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	49.836.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
311	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0111	15.072,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P265	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	75.339.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
312	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0095	12.567,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P271	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	76.071.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
313	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0094	25.601,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P272	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	154.969.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
314	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0131	78.240,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P287	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.669.686.312,48	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
315	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0140	19.379,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P295	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00069 NIB. 32.05.000001796.0 (12 Nov 24)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	110.535.700,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 16
316	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0144	6.219,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P298	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00069	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	24.876.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 16
317	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0150	9.674,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P304	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	35.864.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
318	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0158	18.876,00	2011	Tanah Perkantoran / Dompak persil P312	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	107.990.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
319	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0159	29.733,00	2011	Tanah Perkantoran / Dompak persil P313	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	188.466.500,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
320	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0161	18.838,00	2011	Tanah Perkantoran / Dompak persil P315	Hak Pakai	29-Sep-22	32.05.04.05.4.00072	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	224.536.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 2

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
321	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1.3.1.01.00 1.001.005	0001	3.000,00	2007	Jl..Nitikan Desa Sorosutan Kec,Umbul Harjo Yogyakarta	Hak Pakai	6-May-18	Nomor 13.05.13.06.4.00144, (M 2.231 M2) Nomor 13.05.13.06.4.00141 (770 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	2.700.900.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Yogyakarta	ASRAMA SISWA
322	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	30.680,00	2009	Pulau Berhala, Lingga	Hak Pakai	24-Mar-10	21.04.01.06.4.00005 (30.680 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	705.640.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Lingga	TANAH
323	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	17.310,00	2009	P.Berhala	Hak Pakai	24-Mar-10	21.04.01.06.4.00006 (17.310 m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	398.130.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Lingga	TANAH
324	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0005	4.643,00	2009	jl.bangau sakti desa simp.baru kec. tampan pekanbaru	Hak Pakai	15-Nov-10	Nomor 05.01.08.01.1.00022 (4.643 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	928.600.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Pekanbaru	ASRAMA SISWA
325	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0003	590,00	2011	jl.cikutra kel. neglasari cibeunying kaler bandung 1	Hak Pakai	21-Feb-13	Nomor10.15.18.03.4.00 020 (590 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	949.369.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Bandung	ASRAMA SISWA
326	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0004	200,00	2011	jl.cikutra kel.neglasari cibeunying kaler bandung 2	Hak Pakai	21-Feb-13	Nomor10.15.18.03.4. 00019 (200 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	308.947.200,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Bandung	ASRAMA SISWA
327	Tanah Bangunan Rumah Sakit	1.3.1.01.00 1.004.003	0001	50.000,00	2007	Jl. WR. Supratman, Tanjungpinang	Hak Pakai	22-Mar-21	32.05.02.04.4.00138 (50.000 m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	6.496.920.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	RSUP Raja Ahmad Thabib
328	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0003	1.374,00	2006	Jl. Hangtuah No. 13 Tanjungpinang	Hak Pakai	23-Sep-11	32.05.01.02.4 00748	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	735.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	angunan gedungEx Kehutanan jalan Hang Tua
329	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0008	222,00	2006	Jl. Desa Telaga Pungkur Kel. Kabil	Hak Pakai	3-Jan-22	32.02.05.03.4.00030/Kabil	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	637.500.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Batam	
330	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0012	720,00	2006	Pulau Buluh	Hak Pakai	20-Sep-21	32.02.08.02.4.r00117	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	108.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Batam	samping kantor camat
331	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0014	164,00	2006	Jl. Zakaria Ahmad depan SD Pulau Buluh	Hak Pakai	20-Sep-21	32.02.08.02.4.00116	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	24.666.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Batam	
332	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0015	513,00	2006	Pulau Buluh	Hak Pakai	20-Sep-21	32.02.08.02.4.00118	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	210.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Batam	samping masjid
333	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0027	54,87	2006	Jl. Tanjung batu	Hak Pakai	19-Sep-22	32.03.02.02.4.00073	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	27.435.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Karimun	Rumah dinas jalan Sudirman
334	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0028	214,95	2006	Jl. Moro Karimun	Hak Pakai	19-Sep-22	32.03.01.01.4.00076	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	85.980.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Karimun	Tanh bangunan rumah dinas (lapangan Volly)
335	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0030	935,00	2006	Jl. Tanjung Balai Karimun	Hak Pakai	20-Sep-22	32.03.03.07.4.00027	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	607.750.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Karimun	Tanah Bangunan Rumah Dinan (dipakai UPT Perikanan Pemprov)
336	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0031	315,00	2006	Jl. Tanjung Balai Karimun	Hak Pakai	19-Sep-22	32.03.03.07.4.00128	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	204.750.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Karimun	Tanah bangunan kantor upt disnaker
337	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0032	38,06	2006	Jl. Tanjung Batu	Hak Pakai	19-Sep-22	32.03.02.02.4.00074	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	13.321.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Karimun	Tanh bangunan kantor jalan Ahmad yani
338	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0033	330,28	2006	Jl. Penuba Kepri	Hak Pakai	21-Sep-22	32.06.09.02.4.00095 (1114 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	107.339.600,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Lingga	Rumah dinas penuba

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
339	Tanah Kebun Induk	1.3.1.01.00 2.003.002	0001	20.000,00	2006	Jl. Desa Gesek	Hak Pakai	27-12-2019 23-09-2022	Nomor 32.01.09.04.00047 Nomor 32.01.09.04.00051	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	3.000.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Bintan	PDAM Tirta Kepri
340	Tanah Kebun Induk	1.3.1.01.00 2.003.002	0002	5.201,00	2006	Jl. Kelapa Hybrida Gesek	Hak Pakai	23-Sep-22	00030 00031 00032	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	250.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Bintan	Puskeswan
341	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.3.1.01.00 2.002.002	0002	4.600,00	2006	Pulau Penyengat Tanjungpinang	Hak Pakai	4-Mar-19	32.05.01.02.4. 00015 (4.600 M 2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	2.300.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
342	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.3.1.01.00 2.002.002	0003	1.000,00	2006	Jl. Moro	Hak Pakai	19-Sep-22	32.03.01.01.4.00077	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	225.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Karimun	Tanah Bangunan Perumahan (lapangan Volly)
343	Tanah Untuk Jembatan	1.3.1.01.00 3.007.010	0001	2.235,00	2006	Bt 6 Tanjungpinang	Hak Pakai	4-Mar-19	32.05.02.02.4.00019 (2.235 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	HIbah	8.381.250.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Jembatan timbang
344	Tanah Bangunan Kandang Hewan	1.3.1.01.00 1.004.012	0001	4.603,00	2006	Tanah Selat Bintan II, Pengujan, Teluk Bintan, Bintan 4.603 m2 (Pembangunan Hatchery)	Hak Pakai	23-Sep-22	32.01.06.04.4.00003	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	127.963.400,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Bintan	
345	Tanah Untuk Bangunan Pabrik Es	1.3.1.01.00 1.003.023	0001	50.500,00	2021	Jl. Pelabuhan Perikanan No. 01 RW. 01 RT. 01 Kel. Tarempa Timur Kec. Siantan Kab. Kepulauan Anambas	Hak Pengelo	26-Nov-13	Nomor 00001	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pemerintah	707.000.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Anambas	UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Anatang
346	Tanah Kampung	1.3.1.01.00 3.017.001	0001	64.489,00	2009	Pulau Penyengat Tanjungpinang	Hak Pakai	5-May-07	32.05.02.02.4.00011 (64.489 m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	2.579.000.000,00	Dinas Pariwisata	Tanjungpinang	Penyengat
347	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	1.855,00	2002	Jl. Kijang Lama (SLBN 1 Tanjungpinang)	Hak Pakai	7-Nov-22	32.05.02.03.4.00178 (2.714 M2)32.05.02.03.4.00177 (395 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	188.282.500,00	Dinas Pendidikan	Tanjungpinang	SLBN 1 Tanjungpinang
348	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	9.022,00	1988	Jalan Basuki Rahmat	Hak Pakai	7-Sep-22	32.05.04.03.4.00152	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	891.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Kantor UPTD Tanjungpinang
349	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	480,00	1980	Jl. Permaisuri, Pertokoan Anra Wika Square Blok A No. 1, Tanjung Uban - Bintan	Hak Pakai	31-Dec-21	32.01.03.01.4.00240	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	923.325.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Bintan	KPPD Bintan
350	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0002	52,00	1988	Jl. Permaisuri, Pertokoan Anra Wika Square Blok A No. 1, Tanjung Uban - Bintan	Hak Pakai	31-Dec-21	32.01.03.01.4.00239	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	128.971.490,00	Badan Pendapatan Daerah	Bintan	KPPD Bintan
351	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0327	102,00	17-May-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.08.05.4.00023	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	334.748.076,95	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
352	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0328	501,00	17-May-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	30-Jan-18	32.01.08.05.4.00034	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	240.472.300,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
353	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0329	569,00	17-May-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.08.05.4.00019	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	73.392.846,96	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
354	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0330	30,00	17-May-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.08.05.4.00022	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	8.272.046,95	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
355	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0331	226,00	17-May-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.08.05.4.00022	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	34.927.246,95	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
356	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0336	1.145,00	24-May-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.08.05.4.00016	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	159.107.346,96	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
357	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0337	209,00	24-May-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.08.05.4.00018	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	30.604.255,95	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
358	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0338	605,00	24-May-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.08.05.4.00017	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	221.204.846,96	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
359	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0339	144,00	24-May-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	11-Jul-22	32.01.08.05.4.00018	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	22.371.873,95	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
360	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0340	3.301,00	07-Jun-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	25-Oct-22	32.01.08.05.4.00027	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.057.392.500,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
361	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0341	24.789,00	07-Jun-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	17-Nov-22	32.01.03.01.4.00242	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.006.614.411,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
362	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0342	237,00	12-May-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	8-Jul-22	32.01.08.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	160.114.846,95	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
363	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0343	115,00	18-May-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	8-Jul-22	32.01.08.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	99.844.846,95	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
364	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0344	703,00	12-May-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	8-Jul-22	32.01.08.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	333.894.846,95	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
365	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0345	445,00	12-May-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	23-Dec-22	32.01.08.05.4.00036	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	74.105.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
366	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0346	12.194,00	15-Aug-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	25-Oct-22	32.01.08.05.4.00031	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.299.074.500,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
367	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0349	12.181,00	30-Aug-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	25-Oct-22	32.01.08.05.4.00033	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	691.378.177,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
368	Tanah Bangunan Rumah Sakit	1.3.1.01.00 1.004.003	0001	100.000,00	2006	Jl. Indun Suri, Tanjung Uban - Bintan	Hak Pakai	8-Jun-22	32.01.08.01.4.00007	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	2.540.274.100,00	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	Bintan	RSUP Bintan

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
369	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0201	11.511,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P41	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00070	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	47.770.650,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 9 BLOK 4
370	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0212	10.574,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P54	Hak Pakai		00074	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	43.617.750,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 11
371	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0226	13.075,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P68	Hak Pakai		00074	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	58.300.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 11
372	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0277	6.365,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P121	Hak Pakai		00075	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	25.460.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 7
373	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0316	199.558,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P163	Hak Pakai		00074	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.042.915.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 11
374	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0332	22.292,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P181	Hak Pakai		00075	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	120.418.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 7
375	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0076	7.820,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P226	Hak Pakai		00075	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	46.479.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 7
376	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0071	10.616,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P231	Hak Pakai		00075	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	49.259.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 7
377	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0048	40.479,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P252	Hak Pakai		00074	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	232.012.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 11
378	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0126	16.082,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P283	Hak Pakai		00075 / '00076	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	73.448.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 7 Blok 8
379	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0130	7.659,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P286	Hak Pakai		00074	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	74.544.280,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 11
380	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0135	16.560,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P288	Hak Pakai		00075	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	113.737.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
381	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0141	16.819,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P296	Hak Pakai		00075	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	87.809.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 7
382	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0143	9.431,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P297	Hak Pakai		00075	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	53.942.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 7
383	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0352	244,00	25-Oct-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	19-Jan-23	32.01.03.03.4.00024	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	21.345.910,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
384	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0355	818,00	25-Oct-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	25-Jan-23	32.01.03.03.4.00025	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	86.723.221,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
385	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0356	171,00	07-Dec-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	25-Jan-23	32.01.08.05.04.00040	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	12.723.474,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
386	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0357	95,00	07-Dec-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	25-Jan-23	32.01.08.05.4.00038	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	8.963.825,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
387	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0358	209,00	07-Dec-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	25-Jan-23	32.01.08.05.4.00037	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	34.753.600,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
388	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0359	142,00	07-Dec-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	25-Jan-23	32.01.08.05.4.00041	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	21.085.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
389	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0360	754,00	07-Dec-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	25-Jan-23	32.01.08.05.4.00039	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	95.854.900,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
390	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0376	2.063,00	23-Mar-22	Jalan Garuda Raya, Lobam Mas Asri Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	25-Oct-22	32.01.08.05.4.00029	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	487.334.017,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Untuk pembangunan jembatan batam-bintan
391	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	27.424,00	2002	Jln. Pemuda, Tanjungpinang	Hak Pakai	13-Dec-22	32.05.04.03.4.00156 (27.424m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	30.771.868,00	Dinas Pendidikan	Tanjungpinang	SMAN 4 Tanjungpinang
392	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	17.950,00	1999	JALAN BESAR SUNGAI UNGGAR KM. 7	Hak Pakai	12-Nov-19	32.03.12.03.4.00001	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	1.077.000.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 3 KUNDUR
393	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	32.972,00	1999	JALAN RAJA OESMAN	Hak Pakai			Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	8.704.608.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 2 KUNDUR
394	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	23.660,00	1999	JALAN HANG TUAH KM. 4	Hak Pakai	11-Nov-24	NIBEL.32030000041290 (23660m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	957.600.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 2 KUNDUR
395	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	18.928,00	1999	JALAN RAJA HAJI	Hak Pakai	25-Nov-99	05.06.04.03.4.0024	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	529.984.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 1 MORO
396	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	40.263,00	2023	Desa.Kuala Sempang. Kec. Seri Kuala Lobam. Kab. Bintan	Hak Pakai	23-Sep-13	NIB EL. 32.01.000002651.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	P3D	1.811.835.000,00	Dinas Pendidikan	Bintan	SMK4 Kuala Sempang Lobam
397	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.000,00	2001	Jl. Pramuka No.12 Ranai	Hak Pakai	18-Dec-24	NIB. 32.04.000002074.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	2.000.000.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 1 Bunguran Timur
398	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0003	4.630,00	2007	Jl. Patimura Pering-Bandarsyah, Ranai, Indonesia	Hak Pakai	12-Feb-08	32.04.01.07.4.00003 (4.630 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	532.195.932,86	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 2 Bunguran Timur
399	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	17.470,00	2002	Jl. Pramuka No. 7, Tanjungpinang	Hak Pakai	10-Oct-24	NIB. 32.05.000002519.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	2.665.200.000,00	Dinas Pendidikan	Tanjungpinang	SMKN 1 Tanjungpinang
400	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	16.030,00	2002	Jl. DR. Soetomo, Tanjungpinang	Hak Pakai	5-Feb-24	32.05.03.04.4.00103	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	2.644.950.000,00	Dinas Pendidikan	Tanjungpinang	SMAN 1 Tanjungpinang
401	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	18.520,00	2012	Jl. Basuki Rachmat No 4, Tanjungpinang	Hak Pakai	10-Oct-24	NIB. 32.05.000002520.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	4.954.950.000,00	Dinas Pendidikan	Tanjungpinang	SMAN 2 Tanjungpinang
402	Tanah Bangunan Rumah Pendingin	1.3.1.01.00 1.004.014	0001	1.260,00	2011	Wacopek. Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur	Hak Pakai	22-Dec-17	NIB EL. 32.01.000002649.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	74.880.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	Bintan	Tanah Bangunan Pendingin
403	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	10.434,00	2023	Desa.Kuala Sempang. Kec. Seri Kuala Lobam. Kab. Bintan	Hak Pakai	23-Sep-13	NIB EL. 32.01.000002628.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	P3D	469.530.000,00	Dinas Pendidikan	Bintan	SMK4 Kuala Sempang Lobam
404	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	14.724,00	2002	Jl. Pramuka No 1, Tanjungpinang	Hak Pakai	6-Jan-25	NIBEL. 32.05.000002889.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	2.944.800.000,00	Dinas Pendidikan	Tanjungpinang	SMKN 2 Tanjungpinang
405	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0377	3.729,00	44951	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	5-May-23	32.01.08.05.4.00045	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	561.001.666,67	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
406	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0004	11.400,00	31/12/2016	Pelabuhan Ranai, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna	Hak Pakai	5-Jul-23	32.04.01.09.4.00112	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	35.704.738.200,00	Dinas Perhubungan	Natuna	Pelabuhan

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
407	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0018	111.600,00	2020	Sp. Km 15 - Jl. Nusantara kijang	Hak Pakai	21-Dec-23	32.01.01.01.4.00619	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	5.356.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Sertipikat Sebagian
408	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0025	74.200,00	2020	Tuapaya - Tembeling	Hak Pakai	11-Dec-24	NIB EL. 32.01.000002977.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	2.151.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
409	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0028	99.000,00	2020	Sei Kecil - Jl. Sp. Sakera	Hak Pakai	2025	32.01.000003266.0 (19.321m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	2.871.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
410	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0029	33.000,00	2020	Jln. Trans Batubi - Sebangkar	Hak Pakai	2025	32.04.000002347.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	235.950.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Natuna	
411	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0030	25.800,00	2020	Sp. Harapan Jaya - Padang Angus	Hak Pakai	18-Dec-24	NIB. 32.04.000002073.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	129.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Natuna	
412	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0031	62.000,00	2020	Padang Angus - Cemaga	Hak Pakai	2025	32.04.000002371.0 32.04.000002344.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.240.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Natuna	
413	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0032	37.500,00	2020	Sp. Sekunyam - Pian tengah	Hak Pakai	2025	32.04.000002328.0 32.04.000002335.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	187.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Natuna	
414	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0034	50.250,00	2020	Sp. Harapan Jaya - Sp. Bukit Leman	Hak Pakai	18-Dec-24	NIB. 32.04.000002073.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	123.112.500,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Natuna	
415	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0035	108.780,00	2020	Bukit Leman - Trans Batubi	Hak Pakai	2025	32.04.000002338.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	405.205.500,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Natuna	
416	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0036	44.400,00	2020	Trans Batubi - Tg. Kudu	Hak Pakai	18-Dec-24	NIB. 32.04.000002079.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	108.780.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Natuna	
417	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0037	197.890,00	2020	Trans Batubi - Kelarik	Hak Pakai	16 Dec 2024 16 Dec 2024 18 Dec 2024 18 Dec 2024	NIB. 32.04.000002065.0 NIB. 32.04.000002066.0 NIB. 32.04.000002070.0 NIB. 32.04.000002071.4	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	137.533.550,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Natuna	
418	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0038	29.400,00	2020	Bandarsyah - Penagi	Hak Pakai	16 Dec 2024 18 Dec 2024	NIB. 32.04.000002067.0 NIB. 32.04.000002078.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	294.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Natuna	
419	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0040	21.150,00	2020	Batu bayan - Cemaga	Hak Pakai	2025	32.04.000002324.0 32.04.000002336.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	571.050.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Natuna	
420	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0041	24.000,00	2020	Setengar - Teluk Dapih	Hak Pakai	2025	32.04.000002379.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	480.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Natuna	
421	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0042	30.000,00	2020	Sp. Letung - Bandara	Hak Pakai	18-Dec-24	NIB. 32.07.000001503.0 NIB. 32.07.000001509.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	31.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Anambas	
422	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0046	152.600,00	2020	Letung - Kuala Maras	Hak Pakai	18-Dec-24	NIB. 32.07.000001505.0 NIB. 32.07.000001510.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	15.717.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Anambas	
423	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0047	5.760,00	2020	Sp. SMAN 1 Letung - Padang Melang	Hak Pakai	18-Dec-24	NIB. 32.07.000001507.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	5.241.600,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Anambas	
424	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0048	17.220,00	2020	Letung - pelabuhan Letung	Hak Pakai	18-Dec-24	NIB. 32.07.000001504.0 NIB. 32.07.000001508.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	172.200.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Anambas	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
425	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0049	121.100,00	2020	Simpang Pelabuhan Tanjung Berlian - Simpang Urung	Hak Pakai	17-Dec-24	NIB. 32.03.000004568.0 (18 dec 24) NIB. 32.03.000004575.0 (17 dec 24) NIB. 32.03.000004580.4 (17 dec 24)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	4.266.353.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Karimun	
426	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0052	60.200,00	2020	Simpang Batu gajah - (Sp. Limbung) - Musai	Hak Pakai	10-Jan-24	32.06.02.04.4.00007 32.06.02.09.4.00010 32.06.08.06.4.00015 32.06.02.07.4.00026 32.06.08.05.4.00029 32.06.04.06.4.00039 32.06.04.06.4.00040 NIB. 32.06.000003809.0 (17 dec 24)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	526.750.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
427	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0053	119.630,00	2020	Sp. Setajam - Serteh	Hak Pakai	17-Dec-24	NIB. 32.06.000003784.0 NIB. 32.06.000003785.0 NIB. 32.06.000003793.0 NIB. 32.06.000003794.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	939.095.500,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
428	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0055	68.600,00	2020	Daik - Musai	Hak Pakai	17-Dec-24	NIB. 32.06.000003792.0 NIB. 32.06.000003801.0 NIB. 32.06.000003811.0 NIB. 32.06.000003812.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.766.450.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
429	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0056	48.300,00	2020	Musai - Simpang Kerandin	Hak Pakai	17-Dec-24	NIB. 32.06.000003782.0 NIB. 32.06.000003802.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	326.025.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
430	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0057	247.800,00	2020	Simpang Kerandin - Belungkur	Hak Pakai	17-Dec-24	32060000037800 32060000037810 32060000037830 32060000037910 32060000038100 32060000038150	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	2.478.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
431	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0062	54.600,00	2020	Linau - Limbung	Hak Pakai	10-Jan-24	32.06.04.04.4.00217 NIB. 32.06.000003780.0 (17 dec 24) NIB. 32.06.000003786.0 17 dec 24) NIB. 32.06.000003808.0 17 dec 24)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	655.200.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
432	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0063	40.800,00	2020	Simpang Rantau Panjang - Rantau Panjang	Hak Pakai	10-Jan-24	32.06.04.05.4.00008 NIB. 32.06.000003796.0 (17 dec 24)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	69.360.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
433	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0065	108.000,00	2020	Dabo - Simpang Marok Tua	Hak Pakai	17-Dec-24	NIB. 32.06.000003787.0 NIB. 32.06.000003789.0 NIB. 32.06.000003798.0 NIB. 32.06.000003814.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	3.078.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
434	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0066	148.200,00	2020	Simpang Marok Tua - Marok Tua	Hak Pakai	17-Dec-24	NIB. 32.06.000003790.0 NIB. 32.06.000003799.0 NIB. 32.06.000003800.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.482.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
435	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0067	49.000,00	2020	Simpang Marok Tua- Simpang Kuala Raya	Hak Pakai	17-Dec-24	NIB. 32.06.000003814.0 NIB. 32.06.000003795.0 NIB. 32.06.000003813.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	735.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
436	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0069	25.000,00	2020	Simpang Kuala Raya SImpang Sungai Buluh	Hak Pakai	17-Dec-24	NIB. 32.06.000003813.0 NIB. 32.06.000003797.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
437	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0071	41.000,00	2020	Simpang Sungai Buluh - Sp. Jagoh	Hak Pakai	17-Dec-24	NIB. 32.06.000003797.0 NIB. 32.06.000003819.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.476.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
438	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0076	99.360,00	2020	Sp. Tanjung - Sp. Bukit Leman	Hak Pakai	2025	32.04.000002334.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	238.464.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Natuna	
439	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0081	51.870,00	2020	Simpang Sei Bati-Simpang Tugu Stadion-Jelutung	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.03.000004140.4	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	3.916.185.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Karimun	
440	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0083	91.700,00	2020	Sei Asam-Sebele-Penarah-Lebuh (Lebuh - Penarah - Sebele)	Hak Pakai	17-Dec-24	NIB. 32.03.000004569.0 NIB. 32.03.000004581.0 NIB. 32.03.000004615.4	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	365.653.750,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Karimun	
441	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0084	301.000,00	2020	Tanjung Batu-Simpang urung-Simpang Sawang-Sawang- Simpang Perayun- Pelabuhan Tanjung Magom (RUAS 93 SP TUGU NENAS - SP URUNG)	Hak Pakai	17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 17 Dec 2024 17 Dec 2024 17 Dec 2024 17 Dec 2024 18 Dec 2024	NIB. 32.03.000004571.4 NIB. 32.03.000004576.0 NIB. 32.03.000004578.4 NIB. 32.03.000004579.4 'NIB. 32.03.000004570.0 NIB. 32.03.000004572.0 NIB. 32.03.000004573.0 NIB. 32.03.000004574.0 NIB. 32.03.000004577.4	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	17.797.461.111,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Karimun	
442	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0235	1.726,00	2021	Tg. Uban Selatan	Hak Pakai	23-Dec-22	32.01.08.05.4.00036	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	268.596.158,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	Ganti Rugi Kerugian Tanah An.Sarinem No.Bidang 31 Reg No.638/BU/1994
443	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0316	3.738,00	2021	Tanjung Uban, Bintan Kepulauan Riau	Hak Pakai	12-Apr-23	32.01.08.05.4.00042	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	519.622.267,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
444	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.000,00	1999	JALAN BATU LIPAI	Hak Pakai	11-Nov-24	NIBEL.32030000041220 (9778m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	460.000.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMKN 1 Moro
445	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.000,00	1999	JALAN SEI BURU PANGKALAN BALAI	Hak Pakai	18-Dec-24	NIB. 32.03.000004614.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	140.000.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 1 Buru
446	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	18.000,00	2009	Jalan Kempas Dusun Nyiur	Hak Pakai	11-Nov-24	NIBEL.32030000041390 (9782m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	410.954.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 2 Moro
447	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	30.000,00	2005	JL. TOK SADEK TEMBELING	Hak Pakai	24-Sep-24	32.01.000001961.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	3.000.000.000,00	Dinas Pendidikan	Bintan	SMAN 1 Tembeling

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
448	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	21.600,00	2005	JL. SEKERAH NO. 11	Hak Pakai	5-Mar-24	32.01.03.02.4.00013 (21.600 m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	2.358.314.999,00	Dinas Pendidikan	Bintan	SKT
449	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.000,00	2005	JL. KORINDO SEI LEKOP	Hak Pakai	11-Dec-24	NIB. 32.01.000002690.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	100.000.000,00	Dinas Pendidikan	Bintan	SMKN 1 Bintan Timur
450	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	22.500,00	2008	Jl. Kartini, Dabo Singkep, Kec. Singkep	Hak Pakai	13-Nov-24	206000037150 (Luas 14	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	6.097.850.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 2 SINGKEP ada indikasi lahan belum terukur sebelah barat
451	Tanah Bangunan Gudang	1.3.1.01.00 1.002.003	0001	20.000,00	2009	JALAN MUNUNG LAUT DESA CEMAGA KECAMATAN BUNGURAN TIMUR	Hak Pakai	240ct 24	32.04.02.01.4.00012 (11.400m2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	600.000.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 1 Bunguran Selatan
452	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	11.400,00	2017	DESA CEMAGA, KECAMATAN BUNGURAN SELATAN NATUNA	Hak Pakai	24-Oct-24	NIB. 32.04.000001692.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	952.487.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 1 Bunguran Selatan
453	Tanah Bangunan Bangunan Pembibitan	1.3.1.01.00 1.004.013	0001	500.185,00	2007	Desa Toapaya, jl. Tembeling/Lembah sari/Sungai Ngiri, Kec. Gunung Kijang	Hak Pakai	14-Nov-24	NIB. 32.01.000002479.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	1.500.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	Bintan	Bangunan Balai Penyulu Pembibitan
454	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0007	112.397,00	2006	Jl. Desa Toa Paya	Hak Pakai			Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	16.859.550.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Bintan	
455	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0167	18.767,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P 1	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	93.835.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
456	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0168	13.388,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P2	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	66.940.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
457	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0179	19.119,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P18	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	81.255.750,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
458	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0183	27.764,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P22	Hak Pakai		Blok 2	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	115.220.600,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
459	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0204	13.210,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P46	Hak Pakai	16-Dec-20	32.05.04.05.4.00052	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	39.630.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
460	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0205	39.216,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P47	Hak Pakai	16-Dec-20	32.05.04.05.4.00052	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	107.844.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
461	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0211	5.953,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P53	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000003027.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	20.704.200,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 11
462	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0216	27.459,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P58	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002886.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	116.700.750,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
463	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0217	162.598,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P59	Hak Pakai	16-Dec-20	32.05.04.05.4.00052	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	691.041.500,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 11
464	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0218	20.453,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P60	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002887.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	81.812.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
465	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0219	11.159,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P61	Hak Pakai	16-Dec-20	32.05.04.05.4.00052	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	44.636.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
466	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0228	10.003,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P70	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00036	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	30.009.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
467	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0247	59.873,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P89	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	251.537.820,92	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
468	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	19.654,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P90	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	82.570.179,08	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
469	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0164	6.836,00	2011	Tanah Perkantoran / Dompak persil P318	Hak Pakai	19-Oct-22	32.05.04.05.4.00075	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	33.305.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 7 Blok 8
470	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0165	1.245,00	2011	Tanah Perkantoran / Dompak persil P319	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	12.759.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
471	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0166	11.458,00	2011	Tanah Perkantoran / Dompak persil P320	Hak Pakai	11-Nov-24	NIB. 32.05.000001795.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	66.724.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
472	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0261	9.709,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P105	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	38.722.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
473	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0268	76.403,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P112	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002887.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	330.943.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
474	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0276	11.363,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P120	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002887.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	45.452.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
475	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0280	23.985,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P124	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002886.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	100.269.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
476	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0283	7.163,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P128	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	23.863.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
477	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0287	28.123,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P132	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	147.722.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
478	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0290	14.203,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P135	Hak Pakai	16-Dec-20	32.05.04.05.4.00052	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	71.793.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
479	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0292	4.630,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P137	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	21.935.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
480	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0297	15.092,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P142	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002887.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	93.989.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
481	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0301	9.914,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P146	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000003027.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	40.996.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 11
482	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0302	16.163,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P147	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	78.031.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
483	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0310	35.059,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P157	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002887.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	175.297.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
484	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0320	5.145,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P167	Hak Pakai	16-Dec-20	32.05.04.05.4.00052	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	38.319.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
485	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0324	1.693,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P171	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	5.079.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
486	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0325	3.963,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P172	Hak Pakai	2025	32.05.000007215.0 (5231)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	15.852.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
487	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0325	4.923,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P173	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	19.692.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
488	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0326	7.459,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P175	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	42.831.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
489	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0329	11.642,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P178	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002887.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	69.977.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
490	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0334	2.942,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P183	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	8.826.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
491	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0337	2.315,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P186	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	6.945.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
492	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0340	7.671,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P189	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	48.270.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
493	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0343	8.993,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P192	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002886.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	40.769.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
494	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0344	26.047,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P193	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002887.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	133.948.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
495	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0345	5.561,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P194	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000003027.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	28.979.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
496	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0350	10.398,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P199	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	47.579.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
497	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0351	6.923,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P200	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	20.769.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
498	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0352	8.268,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P201	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	24.804.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
499	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0354	40.007,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P203	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	188.761.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
500	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0356	4.053,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P205	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002887.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	51.817.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
501	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0359	2.413,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P208	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	34.646.070,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 11
502	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0365	76.063,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P214	Hak Pakai	8-Nov-17	32.05.04.05.4.00021	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	361.078.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
503	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0068	13.103,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P219	Hak Pakai		Blok 2	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	44.810.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
504	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0077	1.922,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P224	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000003027.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	9.237.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
505	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0074	16.307,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P228	Hak Pakai		Blok 7	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	77.842.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 7
506	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0072	5.171,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P230	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000001797.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	15.513.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
507	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0061	1.562,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P234	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	9.655.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
508	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0063	305,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P235	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	31.915.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
509	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0062	1.917,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P236	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	41.286.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
510	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0066	725,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P238	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	7.705.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
511	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0059	2.300,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P242	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	98.828.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
512	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0043	4.415,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P247	Hak Pakai	23-Sep-22	32.05.04.05.4.00075	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	89.033.810,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
513	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0046	9.097,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P249	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000003025.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	36.388.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
514	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0045	5.204,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P250	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	91.171.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
515	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0050	6.202,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P254	Hak Pakai	19-Oct-22	32.05.04.05.4.00074	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	74.693.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 11
516	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0051	1.397,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P255	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	91.860.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
517	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0112	326,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P264	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	69.185.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
518	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0080	7.055,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P273	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002886.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	73.235.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
519	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0118	3.614,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P276	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	15.536.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
520	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0117	11.087,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P277	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000003025.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	50.628.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
521	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0119	12.587,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P278	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002886.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	69.491.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
522	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0127	3.053,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P284	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	12.212.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
523	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0134	3.603,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P290	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	79.663.600,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 11
524	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0137	23.528,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P292	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002901.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	104.612.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
525	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0138	3.082,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P293	Hak Pakai	12-Nov-24	NIB. 32.05.000002893.0 NIB.32.05.000007216.0 (2.319)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	68.349.200,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
526	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0139	25.646,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P294	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000001797.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	149.980.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
527	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0145	1.849,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P299	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002886.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	14.475.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
528	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0149	3.192,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P303	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.05.000002886.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	25.791.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
529	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0152	9.437,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P306	Hak Pakai		Blok 14	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	39.918.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
530	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0155	4.539,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P309	Hak Pakai	2025	NIB.32.05.000007217.0 (3748)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	194.038.550,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
531	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0162	1.780,00	2011	Tanah Perkantoran / Dompak persil P316	Hak Pakai	12-Nov-24	NIB. 32.05.000002892.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	25.389.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
532	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.004.999	0001	14.700,00	2006	Jl. Kab. Lingga	Hak Pakai	10-Jan-24	32.06.02.08.4.00006	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	3.075.279.851,00	Dinas Perhubungan	Lingga	
533	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1.3.1.01.00 1.004.026	0002	13.000,00	2006	Tanah Pelabuhan Kijang	Hak Pakai	3-Jul-25	NIB.32.01.000004318.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	2.038.660.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Bintan	kapitalisasi ke tanag upt dkp
534	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0017	280,00	2006	Jl. Kartini III Sei Harapan No.10	Hak Pakai	2025	NIB.32.02.000055622.4	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	53.600.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Batam	
535	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0018	200,00	2006	Jl. Kartini III Sei Harapan No. 08	Hak Pakai	2025	NIB.32.02.000055620.4	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	53.600.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Batam	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
536	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0019	220,00	2006	Jl. Kartini III Sei Harapan No. 09	Hak Pakai	2025	NIB.32.02.000055626.4	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	53.600.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Batam	
537	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0020	210,00	2006	Jl. Kartini III Sei Harapan No.11	Hak Pakai	2025	NIB.32.02.000055621.4	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	53.600.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Batam	
538	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0021	252,00	2006	Jl. Kartini III Sei Harapan No. 07	Hak Pakai	2025	NIB.32.02.000055624.4	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	53.600.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Batam	
539	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0023	189,00	2006	Jl. Kartini III Sei Harapan No. 12	Hak Pakai	2025	NIB.32.02.000055623.4	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	53.600.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Batam	
540	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.3.1.01.00 2.002.002	0001	4.674,00	2006	Tanah Kosong Barek Motor - Kijang	Hak Pakai	3-Jul-25	NIB.32.01.000004318.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	1.623.300.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Bintan	Tanah Bangunan Psar Barek Motor
541	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0351	1.909,00	25-Oct-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	5-May-23	32.01.08.05.4.00046	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	274.735.500,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
542	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0353	308,00	25-Oct-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	5-May-23	32.01.08.05.4.00046	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	41.205.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
543	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0354	106,00	25-Oct-22	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	5-May-23	32.01.08.05.4.00046	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	17.987.900,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
544	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	10.000,00	31-Dec-08	Jl. Pasar Baru No. 1 Tanjung Uban, Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara	Hak Pakai	24-Sep-24	32.01.000001960.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	170.000.000,00	Dinas Pendidikan	Bintan	SMKN 1 BINTAN
545	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001		2001	Jl. Korindo Km. 22, Sungai Lekop, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Kepri	Hak Pakai	11-Dec-24	NIB. 32.01.000002690.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	300.000.000,00	Dinas Pendidikan	Bintan	SMKN 1 Bintan Timur
546	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	28.640,00	2007	JL. KORINDO. KM.21 RT 001 RW 002 KELURAHAN SEI LEKOP KECAMATAN BINTAN TIMUR, Sungai Lekop, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan Prov. Kepulauan Riau	Hak Pakai	13-Nov-24	NIB. 32.01.000002642.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	587.142.857,00	Dinas Pendidikan	Bintan	SMAN 1 BINTAN TIMUR
547	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0378	6.049,00	44951	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	12-Apr-23	32.01.08.05.4.00043	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	350.789.286,67	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
548	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0379	1.585,00	44978	Jalan Indun Suri Kelurahan tanjung Permai, kecamatan Seri Kuala lobam Kabupaten Bintan	Hak Pakai	12-Apr-23	32.01.08.05.4.00044	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	215.961.666,66	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	jalan umum (jembatan batam-bintan)
549	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0004	0,00	2016	Tanjung Berlian Kundur Utara	Hak Pakai			Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	184.800.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	REKLAS DARI ASET LAIN-LAIN (PERSEDIAAN) - Penimbunan Lahan SMKN Persiapan Tanjung Berlian Kundur Utara

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
550	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0008	0,00	2017	-				Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (kapitalisasi)	Pembelian	213.398.000,00	Dinas Pendidikan	Bintan	Pemasangan Paving Blok di SMAN 1 Bintan Timur
551	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	16.490,00	2024	Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau	Hak Pakai	11-Jun-24	NIB. 32.06.000000160.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	117.903.500,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 1 SINGKEP SELATAN
552	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	7.345,00	2024	Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau	Hak Pakai	11-Jun-24	NIB. 32.06.000000167.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	52.516.750,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMA N 1 SINGKEP PESISIR
553	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	13.185,00	2024		Hak Pakai			Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	32.303.250,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMKN 1 Kundur Utara
554	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	6939	2024		Hak Pakai	7-Jan-20	32.04.01.05.4.00022 (6939 M2)	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	249.804.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMKN 2 Bunguran Timur
555	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001		2024		Hak Pakai		Sertipikat Hak Pakai NIB. 32.01.000002282.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	HIbah	282.922.880,0000	Dinas Pendidikan	Bintan	SLBN Kijang
556	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	9.157,00	2025		Hak Pakai	22-Jul-25	NIB.32.03.000006136.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pembelian	2.206.837.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 1 Selat Gelam
557	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	5.626,00	2025	Tebang	Hak Pakai	22-Sep-22	32.07.02.02.4.00230	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	19.691.000,00	Dinas Pendidikan	Anambas	SMAN 1 Palmatak
558	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	7.771,00	2025	Mubur	Hak Pakai	23-Sep-22	32.07.02.01.4.00169	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Hibah	13.210.700,00	Dinas Pendidikan	Anambas	SMAN 2 Palmatak
559	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	10.198,00	2025		Hak Pakai	2025	NIB.32.06.000005048.0	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		61.188.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 1 Pulau Posek
560	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	7.482,00	2025		Hak Pakai	2025	NIB.32.02.000057787.4	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		7.721.424.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 27 Batam
561	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	9.989,00	2025		Hak Pakai	2025	NIB.32.02.000056746.4	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		10.308.648.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 10 Batam
562	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	4.962,00	2025		Hak Pakai	2025	NIB.32.02.000056752.4	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		5.120.784.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 11 Batam
												782.695.081.905,8200			

DAFTAR TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU YANG BERUPA BIDANG TANAH
BERSERTIPIKAT A.N. PIHAK LAIN

LAMPIRAN 5C

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
1	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	12.750,00	1999	JALAN SUNARYO	Hak Pakai	8-Mar-00	05.06.05.01.4.0002	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI	Hibah	1.045.500.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 1 KUNDUR
2	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	14.378,00	2005	Desa Kampung Hilir. Tambelan		23-Sep-13	32.01.08.03.4.00001	Pemerintah Kabupaten Bintan	Hibah	49.500.000,00	Dinas Pendidikan	Bintan	SMAN 1 Tambelan (P3D)
3	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	12.748,00	2005	JL. RAYA GESEK KM. 23		4-Jul-09	32.01.06.04.00012	Pemerintah Kabupaten Bintan	Hibah	1.274.800.000,00	Dinas Pendidikan	Bintan	SMAN 1 Gunung Kijang
4	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.000,00	1999	JALAN JEND. A. YANI PARIT BENUT	Hak Pakai	11-Jan-07	21.02.0403.4.0004	Pemerintah Kabupaten Karimun	Hibah	2.500.000.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 3 Kundur
5	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1.3.1.01.00 1.001.005	0001	1.998,00	2022	Kel. Pamak Kec. Tebing	Hak Pakai	12-Jun-03	HP.No.01/2003	Pemerintah Kabupaten Karimun	Hibah	119.880.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Karimun	Wisma Transit
6	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	10.034,00	2001	Jl. Pelajar, Sedanau	Hak Pakai	25-Aug-09	32.04.02.01.4.00010	Pemerintah Kabupaten Natuna	Hibah	72.310.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 1 Bunguran Barat
7	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	2.146,00	2007	DESA BATU BELANAK KEC. MIDAI	Hak Pakai	12-Feb-08	32.04.05.02.4.00001 (2.146 M2)	Pemerintah Kabupaten Natuna	Hibah	64.380.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 1 Midai
8	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	20.000,00	2007	Kel. Ranai Darat Kec. Bunguran Timur	Hak Pakai	12-Feb-08	32.04.01.08.4.00001 (20.000 M2)	Pemerintah Kabupaten Natuna	Hibah	600.000.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMKN 1 Bunguran Timur
9	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	23.325,00	2007	DESA PULAU TIGA KECAMATAN PULAU TIGA	Hak Pakai	12-Feb-08	32.04.11.02.4.00001 (23325 M2)	Pemerintah Kabupaten Natuna	Hibah	244.912.500,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 01 Pulau Tiga
10	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	1.808,00	2008	KEL. SEDANAU KEC. BUNGURAN BARAT	Hak Pakai	25-Aug-09	32.04.02.01.4.00010 (1.808 M2)	Pemerintah Kabupaten Natuna	Hibah	90.400.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 1 Bunguran Barat
11	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	3.709,00	2014	SELADING PULAU TIGA	Hak Pakai	12-Feb-08	32.04.11.02.4.00001	Pemerintah Kabupaten Natuna	Hibah	148.360.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 1 Pulau Tiga
12	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	18.300,00	2017	DESA HARAPAN JAYA, KECAMATAN BUNGURAN TENGAH KABUPATEN NATUNA	Hak Pakai	14-Feb-22	32.04.11.02.4.00011 (18.300 M2)	Pemerintah Kabupaten Natuna	Hibah	911.000.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	Sman 1 Bunguran Tengah
13	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	11.883,00	1990	JL.RAYA SEKANAK	Hak Pakai	14-May-09	Nomor 00204	Pemerintah Kota Batam	Hibah	640.493.700,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 2 Batam
14	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	2.041,00	2006	Jl. Teluk Kangkung & Teluk Sunti, Batam	Hak Pakai	5-Aug-09	Nomor 00078	Pemerintah Kota Batam	Hibah	11.225.500,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 13 Batam
15	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0003	15.001,00	2014	Kav. Bukit Kamboja RT 03/ RW:IV Sei Pelunggut Sagulung Batam Kep. Riau	Hak Pakai	23-Jan-14	Nomor 00001	Pemerintah Kota Batam	hibah	216.073.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 5 Batam
16	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	800,00	2009	Jl.Raja Ali Haji No. 1 Kel. Pulau Buluh	Hak Pakai	6-Oct-09	Nomor 00093	Pemerintah Kota Batam	Hibah	28.077.900,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 11 Batam
17	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	838,00	2009	Kelurahan Kasu	Hak Pakai	3-Jun-09	Nomor 00008	Pemerintah Kota Batam	Hibah	9.804.600,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 7 Batam
18	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	10.514,00	2002	Jl. Karya Kampung Baru - Tanjungpinang	Hak Pakai	22-Apr-21	32.05.02.04.4.00137	Pemerintah Kota Tanjungpinang	Hibah	151.619.000,00	Dinas Pendidikan	Tanjungpinang	SMAN 3 Tanjungpinang
19	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	6.979,00	2002	Jln. H. Agus Salim, Tanjungpinang	Hak Pakai	29-Sep-15	00032	Pemerintah Kota Tanjungpinang	Hibah	3.223.767.747,00	Dinas Pendidikan	Tanjungpinang	SMAN 5 Tanjungpinang

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
20	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	4.000,00	2015	Jln. Kp. Sungai Carang (SMAN 7 Tanjungpinang)	Hak Pakai	22-Apr-21	32.05.02.04.4.00136 (10.514M2) 32.05.02.04.4.00137 (6.920 M2)	Pemerintah Kota Tanjungpinang	Hibah	2.137.600.000,00	Dinas Pendidikan	Tanjungpinang	SMAN 7 Tanjungpinang
21	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	54.182,00	2006	Jl. Nusantara Km 15, Tanjungpinang	Hak Pakai	23-Oct-15	00038	Pemerintah Kota Tanjungpinang	Hibah	1.276.367.488,00	Dinas Pendidikan	Tanjungpinang	SMKN 4 Tanjungpinang
22	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0086	641,00	2020	Jalan Gurindam 12	Hak Milik	Belum Balik Nama		Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	1.265.078.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	KEGIATAN TAHUN JAMAK PENATAAN PANTAI GURINDAM 12 KOTA TANJUNGPINANG - Pengadaaan Tanah Untuk Aset Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertahanan
23	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0088	449,00	2020	Jalan Gurindam 12	Hak Milik	Belum Balik Nama		Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	405.666.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	KEGIATAN TAHUN JAMAK PENATAAN PANTAI GURINDAM 12 KOTA TANJUNGPINANG - Pengadaaan Tanah Untuk Aset Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertahanan
24	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0089	111,00	2021	Basuki rahmat-Dompak (Sp.Ramayana), Kota Tanjungpinang	Hak Milik		953	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	1.324.675.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Pembebasan lahan dan Bangunan untuk Fly Over (Sp Ramayana)
25	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0090	124,00	2021	Basuki rahmat-Dompak (Sp.Ramayana), Kota Tanjungpinang	Hak Milik		81	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	1.174.675.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI - Pembebasan Lahan dan Bangunan untuk Fly Over Basuki rahmat-Dompak (Sp.Ramayana), Kota Tanjungpinang SHM NO.81
26	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0091	376,00	2021	Basuki rahmat-Dompak (Sp.Ramayana), Kota Tanjungpinang	Hak Milik		80	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	1.334.675.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI - Pembebesan Lahan dan Bangunan untuk Fly Over Basuki rahmat-Dompak (Sp.Ramayana), Kota Tanjungpinang
27	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0029	443,82	2006	Jl. Pulau Kasu	Hak Pakai			Perorangan (Belum Balik Nama)	Hibah	110.955.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Batam	
28	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0362	364,00	28-Dec-22	Jl. ke Tg. Sebauk RT.03 RW.04 , Senggarang Kota Tanjungpinang	NULL	14-Dec-20	'HM.00805	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	55.906.060,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang
29	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0366	627,00	29-Dec-22	Jl. Datuk Pakau RT.03 RW.04, Senggarang Kota Tanjungpinang	NULL	14-Aug-19	HM.00699	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	79.752.060,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang
30	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0367	47,00	29-Dec-22	Jl. Datuk Pakau RT.03 RW.04, Senggarang Kota Tanjungpinang	NULL	14-Dec-20	HM.00799	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	18.289.660,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang
31	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0368	167,00	29-Dec-22	Jl. ke Tg. Sebauk, Senggarang Kota Tanjungpinang	NULL	5-Feb-16	HM.349	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	34.289.660,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang
32	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0369	96,00	28-Dec-22	Jl. Datuk Pakau RT.03 RW.04, Senggarang Kota Tanjungpinang	NULL	14-Dec-20	HM.00806	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	23.494.260,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang
33	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0370	499,00	28-Dec-22	Jl. Senggarang Darat RT.4 RW.4Kota Tanjungpinang	NULL	26-Aug-19	'HM.00682	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	71.636.460,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang
34	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0371	1.687,00	29-Dec-22	Jl. Datuk Pakau RT.03 RW.04 , Senggarang Kota Tanjungpinang	NULL	14-Dec-20	HM.00834	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	218.897.660,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
35	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0372	3.239,00	29-Dec-22	Senggarang Kota Tanjungpinang	NULL	19-May-92	HM.00073	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	367.289.660,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang
36	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0373	51,00	28-Dec-22	Jl. Datuk Pakau, Senggarang Kota Tanjungpinang	NULL	14-Dec-20	HM.00835	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	19.523.660,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang
37	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0374	1.383,00	30-Dec-22	Senggarang Kota Tanjungpinang	NULL	19-May-92	HM.00072	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	166.289.660,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang
38	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0383	218,00	45163	Jalan Senggarang, Kota Tanjungpinang	Hak Pakai	14-Dec-20	SERTIFIKAT HAK MILIK No.00799	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	24.208.200,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Jalan Senggarang, Kota Tanjungpinang
39	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0385	201,00	45184	jalan di Senggarang Kota Tanjungpinang	NULL	5-Feb-16	HM 351	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	25.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah Untuk Jalan
40	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	3.846,00	31/12/1994	Jl. Pelabuhan Perintis Pulau Berhala Kel. Letung Kec Jemaja Kab. Kepulauan Anambas	Hak Pakai	NULL	32.07.06.05.4.00005	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	61.536.000,00	Dinas Perhubungan	Anambas	Pelabuhan Letung
41	Lain-lain Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	1.3.1.01.00 1.004.026	0005	9.033,00	43196	Desa Teluk Sasah Kec Seri Kuala Lobam Kab Bintan Prov Kepulauan Riau	Hak Pakai	10-Apr-17	32.01.08.02.4.00005	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	64.585.950,00	Dinas Perhubungan	Bintan	Hak Pakai
42	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0003	3.376,00	18/05/1990	Jalan Pelabuhan Dabo Singkep	Hak Pakai	NULL	32.06.01.01.4.00239	Perorangan (Belum Balik Nama)	Pembelian	1.780.825.733,00	Dinas Perhubungan	Lingga	Kantor
43	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	2.505,00	2024	KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA KARIMUN Desa/Kelurahan Sungai Raya, Kec. Meral, KABUPATEN				Pemerintah Kabupaten Karimun	HIbah	266.254.082,0000	Badan Pendapatan Daerah	Karimun	KPPD Karimun
												23.709.574.200,0000			

DAFTAR TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU YANG BERUPA BIDANG TANAH
BELUM BERSERTIPIKAT

LAMPIRAN 5D

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
1	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.000,00	2001	Jl. Panglima Hujan, Sedanau					Hibah	1.449.000.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMKN 1 Bunguran Barat
2	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001		2001	Jl. Patimura Pering-Bandarsyah, Ranai, Indonesia	Hak Pakai				Hibah	1.705.000.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 2 Bunguran Timur
3	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0087	450,00	2020	Jalan Gurindam 12	Belum Balik Nama			Alas Hak	Pembelian	158.356.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	KEGIATAN TAHUN JAMAK PENATAAN PANTAI GURINDAM 12 KOTA TANJUNGPINANG - Pengadaaan Tanah Untuk Aset Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertahanan
4	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0002	41.650,00	2018	Jalan Asia Afrika, Tanjungpinang					Pembelian	4.202.222.500,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	
5	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0005	19.600,00	2018	Jalan Dompak Pelabuhan Roro Tanjungpinang					Pembelian	4.550.924.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	simpang lampu merah ke pabuhan roro, termasuk dengan pengadaan jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
6	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0008	31.260,00	2018	Jalan Handoyo Putro, Tanjungpinang					Pembelian	31.227.688.800,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	
7	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0011	112.000,00	2018	Jl. Dompak Seberang, Tanjungpinang					Pembelian	21.268.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	
8	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0019	47.500,00	2020	Km. 18 Kijang - Km. 20 Gesek					Pembelian	2.280.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
9	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0020	127.400,00	2020	SP. Korindo - Kangka					Pembelian	5.860.400.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
10	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0022	28.800,00	2020	Sp. Gesek - Tuapaya					Pembelian	1.065.600.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
11	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0023	127.800,00	2020	Tuapaya-Km.46					Pembelian	2.939.400.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
12	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0024	30.100,00	2020	Sp. Lagoi-Sp. Sei Kecil					Pembelian	1.264.200.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
13	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0026	98.000,00	2020	Malang Rapat - Iome					Pembelian	2.254.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
14	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0033	29.000,00	2020	Padang Angus Binjai					Pembelian	580.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Natuna	
15	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0039	56.960,00	2020	Jl. Lingkar Serasan					Pembelian	407.264.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Natuna	
16	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0043	30.550,00	2020	Jalan Kampung Melayu - Tiangau					Pembelian	1.558.050.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Anambas	
17	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0044	40.000,00	2020	Jalan Payalaman - Ladan					Pembelian	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Anambas	
18	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0045	26.300,00	2020	Sp. Payalaman - Langir					Pembelian	526.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Anambas	
19	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0050	37.000,00	2020	Jalan Parit Tegak					Pembelian	185.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Karimun	
20	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0051	18.000,00	2020	Jalan sei Buluh - Batu Limau - Alai					Pembelian	90.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Karimun	
21	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0054	10.850,00	2020	Sp. Pahang - Sp. Tanda					Pembelian	292.950.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
22	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0058	105.720,00	2020	Simpang Sungai Tenam - Mentuda					Pembelian	1.057.200.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
23	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0059	33.960,00	2020	Simpang Panggak Darat - Simpang Panggak Laut					Pembelian	368.466.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
24	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0060	27.180,00	2020	Simpang Linau - Linau					Pembelian	271.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
25	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0061	26.000,00	2020	Simpang Kerandin - Kerandin					Pembelian	260.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
26	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0064	69.780,00	2020	Simpang Budus - Pelabuhan Roro Penarik					Pembelian	837.360.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
27	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0068	18.500,00	2020	Simpang Kuala Raya - Kuala Raya					Pembelian	370.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
28	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0070	2.750,00	2020	Simpang Sungai Buluh - Sungai Buluh					Pembelian	99.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
29	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0072	47.700,00	2020	Dabo - Kebun Nyiur					Pembelian	1.192.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
30	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0073	72.240,00	2020	Simpang Marok Kecil - Marok Tua					Pembelian	619.458.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
31	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0074	6.000,00	2020	Dabo - Pelabuhan Dabo					Pembelian	837.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Lingga	
32	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0075	51.100,00	2020	SP. Sialang - Pelabuhan Berakit					Pembelian	2.325.050.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
33	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0077	81.000,00	2020	Sp. Lagoi - Lintas Barat					Pembelian	2.349.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Bintan	
34	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0078	62.940,00	2020	Simpang Tugu - Pelabuhan Malarko					Pembelian	786.750.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Karimun	
35	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0079	10.780,00	2020	Jl. Nusantara - Setiabudi					Pembelian	9.890.650.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Karimun	
36	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0080	55.000,00	2020	Tanjung Balai - Sei bati					Pembelian	9.900.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Karimun	
37	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0082	117.600,00	2020	Jalan Pesisir Pantai Karimun					Pembelian	23.402.400.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Karimun	
38	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0085	144.000,00	2020	Simpang perayun-Simpang Kempas-Pelabuhan Tanjung Berlian (Sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian)					Pembelian	2.152.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Karimun	
39	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0092	156,00	2021	Basuki rahmat-Dompak (Sp.Ramayana), Kota Tanjungpinang					Pembelian	1.324.675.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Pembebasan Lahan dan Bangunan untuk Fly Over Basuki rahmat-Dompak (Sp.Ramayana), Kota Tanjungpinang
40	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	600,00	1987	Jl. Kartini					Hibah	396.300.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 1 Batam
41	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	12.853,43	1987	Jln. R. Soeprapto No.1 Sekupang					Hibah	3.442.137.505,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 1 Batam
42	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	50.000,00	1996	Jl. Prof. Dr. Hamka No. 1 Tembesi					Hibah	5.000.000.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 1 Batam
43	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	15.000,00	2002	Jln. Pendidikan No. 8 Bengkong Sadai, Kec. Bengkong					Hibah	6.580.500.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 8 Batam
44	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	15.000,00	2002	Jl. Kav. Lama, Batam					Hibah	5.388.000.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 5 Batam

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
45	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	4.039,00	2002	Pulau Air Raja, Batam					Hibah	11.713.100,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 6 Batam
46	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	384,00	2002	Pulau Air Raja, Batam					Hibah	1.190.400,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 6 Batam
47	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	18.000,00	2003	Jl. Merbau Kel. Karas Kec.Galang					Hibah	84.600.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 9 Batam
48	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	2.937,00	2004	Sijantung RT01/RW02					hibah	23.496.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 10 Batam
49	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	16.000,00	2006	Kel.Baloi Permai Kec. Batam Kota Batam jln. Pemuda no.5, Batam Kota Batam Centre					hibah	13.376.000.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 2 Batam
50	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	8.900,00	2007	Jl. Tamalatea Kel. Tg. Sengkuang Kec Batu Ampar			32.02.000056782.4		hibah	5.286.600.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 14 Batam
51	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	1.550,00	2009	Kav. Bukit Kamboja RT 03/ RW:IV Sei Pelunggut Sagulung Batam Kep. Riau					hibah	440.665.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 5 Batam
52	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	5.781,38	2010	Kav Mangsang Permai Kel Mangsang Kec Sei Beduk			32.02.000055625.4		hibah	1.918.838.362,50	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 16 Batam
53	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	1.841,60	2014	Batam Kota					hibah	150.854.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 7 Batam
54	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.000,00	2007	JL. Let.Jend. S.Parman Kel. Duriangkang Kec. Sei. Beduk kota Batam			32.02.000057793.4		hibah	5.858.000.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 3 Batam
55	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	9.488,00	2009	Jl. Hang Kesturi Jabi Batu Besar Nongsa					hibah	3.813.631.200,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 15 Batam
56	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.000,00	2010	Kp.Panau Kel. Kabil Kec. Nongsa Batam					hibah	5.964.000.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 6 Batam
57	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	732,70	2006	Jl.Raja Ali Haji No. 1 Kel. Pulau Buluh					hibah	250.000.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 11 Batam
58	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	10.189,24	2009	Dapur 12			32.02.000056781.4		hibah	2.952.780.884,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 17 Batam
59	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	2.650,00	2009	Kav. Bukit Kamboja RT 03/ RW:IV Sei Pelunggut Sagulung Batam Kep. Riau					hibah	656.670.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 5 Batam
60	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	18.734,00	2002	Jln. Raya Senggarang					Hibah	880.000.000,00	Dinas Pendidikan	Tanjungpinang	SMAN 6 Tanjungpinang
61	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	10.500,00	1999	Jalan Sersan H. Ibrahim Yakub					Hibah	220.500.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 1 Durai
62	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	9.815,00	1999	JALAN RAJA OESMAN KAPLING					Hibah	5.741.775.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 1 Karimun
63	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	40.000,00	1999	JALAN SEI BATI					Hibah	2.120.000.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMAN 4 Karimun
64	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	91.368,00	1999	JALAN POROS PAYA CINCIN SEI BETI					Hibah	4.842.504.000,00	Dinas Pendidikan	Karimun	SMKN 1 Karimun
65	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.900,00	2005	JL. SEGILING					Hibah	209.000.000,00	Dinas Pendidikan	Bintan	SKT

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
66	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	10.000,00	2005	JL. PASAR BARU					Hibah	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan	Bintan	
67	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	12.337,00	1994	Jl.Pelajar RT.004/RW.008 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kab.Lingga					Hibah	1.937.489.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 1 SINGKEP terindikasi double catat
68	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.000,00	2011	Dusun II Desa Rejai					Hibah	39.200.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 3 SENAYANG
69	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.000,00	2011	Desa Temiang Dusun I Tajur Biru Kec.Senayang, Kab.Lingga					Hibah	2.470.960.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	SMAN 4 SENAYANG
70	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	60.000,00	2016	Tanjung Mulia, Dusun Muntai, Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah					Hibah	6.979.500,00	Dinas Pendidikan	Anambas	SMKN 2 Anambas
71	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	60.000,00	2001	Jl. Taruna - Bandarsyah					Hibah	300.000.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMKN 1 Bunguran Timur
72	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.000,00	2001	Jl. Ibrahim, Kelarik					Hibah	50.000.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 1 Bunguran Utara
73	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.000,00	2001	Jl. Pantai sisi, Serasan					Hibah	120.000.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 1 Serasan
74	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	6.200,00	2001	JL. Raya Tanjung Lampung			Surat Pernyataan Hibah Nomor 02/593/2006, tanggal 16 Mei 2006		Hibah	1.122.750.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 1 Midai
75	Tanah Bangunan Gudang	1.3.1.01.00 1.002.003	0001	5.524,00	2009	JL. TANJUNG DESA TANJUNG KEC. BUNGURAN TIMUR LAUT					Hibah	215.436.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 1 Bunguran Timur Laut
76	Tanah Bangunan Gudang	1.3.1.01.00 1.002.003	0002	9.995,00	2009	JL. TANJUNG DESA TANJUNG KEC. BUNGURAN TIMUR LAUT					Hibah	389.805.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 1 Bunguran Timur Laut
77	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.000,00	2006	Desa Tanjung Ke.Bunguran Timur Laut					Hibah	360.000.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMKN 1 Bunguran Timur Laut
78	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	5,41	2007	JL. SIHOTANG KEL. RANAI					Hibah	1.595.360.000,00	Dinas Pendidikan	Natuna	Sekolah Luar Biasa Negeri Natuna
79	Tanah Lapangan Olahraga Lain-lain	1.3.1.01.00 3.001.999	0001	1.500,00	2021	SMKN 9 BATAM	Hak Pengelolaan				Pembelian	43.789.201,20	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 9 Batam
80	Tanah Lapangan Apel/Upacara	1.3.1.01.00 3.002.006	0001	150,00	2021	SMAN 1 PULAU LAUT	Hak Pengelolaan				Pembelian	119.830.920,00	Dinas Pendidikan	Natuna	SMAN 1 Pulau Laut
81	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0002	769,00	2006	Jl. Batu Hitam TPI					Hibah	769.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
82	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0003	1.305,00	2006	Tambelan					Hibah	293.625.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Bintan	5 Rumah Dinas
83	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0015	320,00	2006	Jl. Merdeka Tanjungpinang					Hibah	637.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	POMAL Tanjungpinang (Double PenCatatan Antara Pemprov Dan Al)
84	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0019	2.000,00	2006	Jl. Ranai	Hak Pakai				Hibah	550.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Natuna	
85	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0022	4.565,00	2006	Kampung Baru Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kepulauan Anambas					Hibah	1.412.500.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Anambas	digunakan sebagai rumah dinas UPT LHK Anambas

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
86	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0025	500,00	2006	Jl. Rejai - Kec.Senayang					Hibah	125.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Lingga	
87	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0027	163,00	2006	Jl. Kec. Singkep - Lingga					Hibah	36.675.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Lingga	
88	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0028	400,00	2006	Jl. Dabo Singkep					Hibah	90.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Lingga	
89	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0029	1.600,00	2006	Jl. Desa Kep. Lanjutan					Hibah	240.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Lingga	
90	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0030	1.800,00	2006	Jl. Desa Payuluas					Hibah	360.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Lingga	
91	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0031	1.400,00	2006	Jl. Kel. Daik Sipicau					Hibah	210.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Lingga	
92	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0036	4.565,00	2006	Tanjung Momong Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kepulauan Anambas					Hibah	1.380.283.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Anambas	(Luas sebenarnya 225 M2)
93	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0037	4.510,00	2006	Genting Dusun Kel. Letung Kec. Jemaja Kab. Kepulauan Anambas					Hibah	789.250.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Anambas	
94	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0038	150,00	2006	Tanjungpinang					Hibah	150.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
95	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0370	733,00	2008	Tanah Jalan / Dompak persil J1					Pembelian	436.000.128,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
96	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0371	2.149,00	2008	Tanah Jalan / Dompak persil J2					Pembelian	214.912.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
97	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0040	617,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J3					Pembelian	176.011.500,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
98	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0096	2.320,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J4					Pembelian	26.960.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
99	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0109	2.677,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J5					Pembelian	27.016.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
100	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0105	803,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J6					Pembelian	6.424.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
101	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0098	3.564,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J7					Pembelian	28.512.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
102	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0110	1.784,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J8					Pembelian	14.272.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
103	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0108	1.432,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J9					Pembelian	11.456.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
104	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0106	503,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J10					Pembelian	4.024.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
105	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0107	520,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J11					Pembelian	4.160.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
106	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0097	497,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J12					Pembelian	3.976.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
107	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0089	1.964,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J13					Pembelian	15.712.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
108	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0091	1.580,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J14					Pembelian	12.640.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
109	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0088	2.248,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J15					Pembelian	17.984.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
110	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0090	1.474,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J16					Pembelian	11.792.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
111	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0087	4.721,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J17					Pembelian	40.698.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
112	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0081	6.258,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J18					Pembelian	50.064.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
113	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0083	2.490,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J19					Pembelian	19.920.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
114	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0085	1.930,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J20					Pembelian	15.440.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
115	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0086	1.849,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J21					Pembelian	14.792.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
116	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0084	1.054,00	2009	Tanah Jalan / Dompak persil J22					Pembelian	8.432.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanah untuk bidang jalan dari jembatan 2 ke jembatan 3 dompak
117	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0172	5.142,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P11					Pembelian	16.968.600,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
118	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0173	19.475,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P12					Pembelian	64.267.500,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
119	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0178	11.573,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P17					Pembelian	49.185.250,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
120	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0180	9.453,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P19					Pembelian	40.175.250,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
121	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0202	28.365,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P43					Pembelian	117.714.750,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
122	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0213	19.925,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P55					Pembelian	102.618.900,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
123	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0214	19.997,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P56					Pembelian	102.984.550,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
124	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0215	19.990,00	2006	Tanah Perkantoran / Dompak persil P57					Pembelian	102.948.500,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
125	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0221	44.698,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P63	37				Pembelian	185.794.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
126	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0230	9.296,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P72					Pembelian	37.182.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
127	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0234	11.171,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P76					Pembelian	43.513.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
128	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0248	13.375,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P91					Pembelian	53.500.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
129	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0163	850,00	2011	Tanah Perkantoran / Dompak persil P317					Pembelian	47.558.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
130	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0275	6.284,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P119					Pembelian	48.525.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
131	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0285	19.952,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P130					Pembelian	99.760.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
132	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0286	9.287,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P131					Pembelian	41.359.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
133	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0300	13.572,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P145					Pembelian	64.147.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
134	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0305	5.338,00	2007	Tanah Perkantoran / Dompak persil P150	Hak Pakai				Pembelian	102.301.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 11
135	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0315	26.037,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P162					Pembelian	85.226.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
136	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0318	9.166,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P165					Pembelian	27.498.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
137	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0325	6.387,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P174					Pembelian	28.965.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
138	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0335	15.834,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P184					Pembelian	68.793.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
139	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0336	7.615,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P185					Pembelian	30.460.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
140	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0338	11.281,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P187					Pembelian	45.124.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
141	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0342	19.553,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P191					Pembelian	78.212.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
142	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0355	9.679,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P204					Pembelian	38.716.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
143	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0366	5.617,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P215					Pembelian	231.073.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
144	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0368	5.330,00	2008	Tanah Perkantoran / Dompak persil P217					Pembelian	25.704.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
145	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0075	6.317,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P227					Pembelian	50.971.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
146	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0073	11.508,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P229					Pembelian	53.916.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
147	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0060	48,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P240					Pembelian	25.944.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
148	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0057	3.483,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P243					Pembelian	20.992.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
149	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0041	2.491,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P244					Pembelian	9.964.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
150	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0054	2.688,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P258					Pembelian	89.725.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 11
151	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0093	7.421,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P274					Pembelian	31.038.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
152	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0092	5.778,00	2009	Tanah Perkantoran / Dompak persil P275					Pembelian	25.999.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
153	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0120	17.825,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P279					Pembelian	71.300.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
154	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0121	16.186,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P280					Pembelian	91.963.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
155	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0122	2.430,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P281					Pembelian	16.290.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
156	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0125	559,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P282					Pembelian	3.207.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
157	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0128	5.133,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P285					Pembelian	93.803.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
158	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0133	4.239,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P289					Pembelian	242.720.300,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
159	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0136	2.742,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P291					Pembelian	173.986.700,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	BLOK 4
160	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0146	5.944,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P300					Pembelian	30.126.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
161	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0147	2.311,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P301					Pembelian	25.992.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Blok 11
162	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0148	9.803,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P302					Pembelian	29.409.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
163	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0151	5.433,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P305					Pembelian	21.732.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
164	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0153	981,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P307					Pembelian	36.424.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
165	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0154	1.068,00	2010	Tanah Perkantoran / Dompak persil P308					Pembelian	49.630.600,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
166	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0156	1.010,00	2011	Tanah Perkantoran / Dompak persil P310			7.0		Pembelian	31.187.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
167	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0157	364,00	2011	Tanah Perkantoran / Dompak persil P311					Pembelian	5.090.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
168	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0160	2.260,00	2011	Tanah Perkantoran / Dompak persil P314					Pembelian	12.010.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
169	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0373	487.174,00	2006	Penarik II Senggarang					Hibah	17.538.084.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Hibah dari Bintan Tahun 2006 berdasarkan BA Nomor13/BA/ADM-PEM/VI/2006
170	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0006	365,75	2006	Jl. Hangtuah TPI					Hibah	731.500.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
171	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0007	125,75	2006	Jl. Hermansyah TPI					Hibah	188.625.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
172	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0013	158,50	2006	Jl. Pulau Buluh					Hibah	23.775.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Batam	
173	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0001	240,00	2006	Jl. Kartini III Sei Harapan No. 22					Hibah	53.600.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	
174	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0002	220,00	2006	Jl. Kartini III Sei Harapan no. 23					Hibah	53.600.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	
175	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0024	200,00	2006	Jl. Kartini III Sei Harapan No. 25					Hibah	53.600.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Batam	
176	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1.3.1.01.00 1.001.005	0001	2.627,00	2006	Jl. Kartini I Sei Harapan No. 30					Hibah	3.660.325.782,83	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Batam	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
177	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Lain-Lain	1.3.1.01.00 1.001.999	0003	500,00	2006	Jl. Tangsi					Hibah	250.000.000,00	Dinas Pendidikan	Lingga	
178	Tanah Kebun Induk	1.3.1.01.00 2.003.002	0003	40.000,00	2006	Jl. Desa Brindat KM.5					Hibah	6.000.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Lingga	
179	Tanah Kebun Induk	1.3.1.01.00 2.003.002	0004	10.000,00	2006	Jl. Desa Kuala Paya					Hibah	1.500.000.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Lingga	
180	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	1.3.1.01.00 2.001.003	0001	17.173,00	2006	Jl. St Mahmud TPI					Hibah	3.434.600.000,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	
181	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	2.000,00	1999	PASIR PANJANG SEMEMAL					Hibah	70.076.300,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Karimun	Permohonan Sertipikat
182	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	54.312,00	1980	JL. BASUKI RAHMAT NO.1	Hak Pakai				Hibah	29.398.961.221,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	Tanjungpinang	Tanh Bangunan EX kantor Bupati Sertipikat belum Diketemukan Keberadaanya
183	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0003	6.000,00	2021	Jl. Engku Putri No.8, Tlk. Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29432					Pembelian	7.644.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Batam	Gedung Graha Kepri
184	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0361	412,00	2022	RT.004/RW.004 Kel. Senggarang Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang	NULL	24-Oct-22	SKPPT 008/G-1/2022		Pembelian	57.126.660,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang
185	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0363	71,00	2022	Senggarang Darat RT.003/RW.004 Kel. Senggarang Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang	NULL	20-Nov-12	SKGK 212/590/XI/2012		Pembelian	21.453.460,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang
186	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0364	346,00	2022	Senggarang Darat RT.003 RW.004 Kota Tanjungpinang	NULL	2-Dec-16	SKGK 139/590/XII/2016		Pembelian	51.807.660,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang
187	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0365	628,00	2022	Senggarang Darat RT.003 RW.004 Kota Tanjungpinang	NULL	9-Mar-04	SKGK 17/590/III/2004		Pembelian	79.046.460,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang
188	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0375	852,00	2022	Senggarang Darat RT.003 RW.004 Kota Tanjungpinang	NULL	29-Jan-14	SKGK 14/590/I/2014		Pembelian	106.541.260,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Tanah untuk jalan di senggarang
189	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	1.000,00	10-Dec-22	Jl. Pasar Baru No. 1 Tanjung Uban, Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara					Pembelian	45.400.000,00	Dinas Pendidikan	Bintan	SMKN 1 BINTAN
190	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	10.000,00	28-Dec-01	JL. TENGKU HASAN BIN TENGKU SINDOET NO. 1, Kukup, Kec. Tambelan, Kab. Bintan, Kepulauan Riau					Hibah	50.000.000,00	Dinas Pendidikan	Bintan	SMAN 1 TAMBELAN
191	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0001	1.505,00	12-Aug-93	Jalan Pramuka no 7B sei harapan sekupang Batam					Hibah	1.239.090.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Batam	
192	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0381	22.477,56	45047	Jl. Gurindam 12	NULL	NULL	NULL		Pembelian	16.518.908.550,76	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Jl. Gurindam 12
193	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0382	937,00	45163	Jalan Senggarang, Kota Tanjungpinang	Hak Pakai	6-Mar-23	SKT (surat keterangan tanah) 004/G-1/2023		Pembelian	98.000.200,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Jalan Senggarang, Kota Tanjungpinang
194	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.3.1.01.00 3.007.002	0384	533,00	45069	Jalan Senggarang, Kota Tanjungpinang	Hak Pakai	10-Sep-08	SKGK No. 75/590/IX/2008		Pembelian	55.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Jalan Senggarang, Kota Tanjungpinang
195	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.00 1.004.001	0002	20.800,00	09/02/2000	Jalan Pelabuhan Dabo Singkep	Hak Pakai	NULL	NULL		Pembelian	5.355.854.000,00	Dinas Perhubungan	Lingga	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
196	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	1.3.1.01.00 3.003.006	0001	728,00	41844	Jalan Pelabuhan Dabo Singkep	Hak Pakai	NULL	NULL		Pembelian	198.200.000,00	Dinas Perhubungan	Lingga	Lahan Kosong
197	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1.3.1.01.00 1.004.026	0002	5.000,00	37929	Jl. WISATA BAHARI KM. 50 (OBJEK	NULL	NULL	NULL		Pembelian	133.125.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Bintan	

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
198	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	2.086,00	2023	Jl. S. Parman Keluarahan Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk Kota Batam					Pembelian	11.654.200,0000	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 9 BATAM
199	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0002	1.011,00	2023	Jl. S. Parman Keluarahan Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk Kota Batam					Pembelian	6.601.700,0000	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 9 BATAM
200	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	1.3.1.01.01. 04.999	0001	39,97	2024	Desa/Kelurahan Sungai Enam, Kec. Bintan Timur, KABUPATEN BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU					HIbah	1.059.261.600,0000	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Bintan	Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bintan BAST Nomor:B/898/032/IX2024 Nomor: B/032.3/842.1/BKAD-SET 2024 Tanggal 13 September 2024 NPHD Nomor:B/897/032/IX/2024 Nomor:B.032.3/841.1/BKAD-SET/2024 Tanggal 13 September 2024
201	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	10000	2005	Jln. Pantai Indah RT 01, RW 09 Kel. Tanjung Uma Kec.		-	-		HIbah	7.502.000.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 12
202	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	552,5	2008	Jl. Tamalatea Kel. Tg. Sengkuang Kec Batu Ampar		-	-		HIbah	337.577.500,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 14
203	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	10000	2001	Jl. Rajawali Kel. Belian Kec. Batam Kota		_	_		HIbah	8.522.000.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 3 Batam
204	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	1.593,00	2002	tiban lama		-	-		HIbah	1.593.000.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 4 Batam
205	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	48,00	2004	tiban lama		-	-		HIbah	48.000.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 4 Batam
206	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	68,00	2011	tiban lama		-	-		HIbah	68.000.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 4 Batam
207	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	538,00	2011	tiban lama		-	-		HIbah	538.000.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 4 Batam
208	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	10.125,70	2008	Tiban II, kel.patam lestari, Kec.Sekupang Batam		-	-		HIbah	5.285.615.400,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMK Negeri 4
209	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	3.07	2015			-	-		HIbah	221.564.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 7 Batam
210	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	13.230,00	2015			-	28020721		HIbah	219.065.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMKN 5 Batam
211	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	5509	31/12/2019	Fasum Tanjung Buntung			32.02.000056783.4		HIbah	188.400.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 25 Batam
212	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	3000	31/12/2015	Lahan Fasum Legenda Malaka					HIbah	183.700.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 20 Batam
213	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	1055	2020	Autis Centre		22-Jun-20	22.096.090.377.001		HIbah	1.493.880.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	Autis Centre
214	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	2159	2020	Sekolah Luar Biasa		22-Jun-20	22.096.090.377.002		HIbah	3.057.144.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	Sekolah Luar Biasa
215	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	10843	2021	SMAN 20 Batam		22-Jun-21	22.096.090.377.003		HIbah	15.353.688.000,00	Dinas Pendidikan	Batam	SMAN 20 Batam
216	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001	20.250,75	2025	Desa Tanjung Batang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna					Hibah	10.000.000,0000	Dinas Pendidikan	Natuna	USB SMAN

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
217	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.3.1.01.00 2.002.002	0001	15950.00	2025	Monumen Tugu Bahasa Nasional di Pulau Penyengat Desa/Kelurahan Penyengat, Kec. Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau		12-Dec-25			Hibah	159.500.000,0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tanjungpinang	Monumen Rugu Bahasa
												379.987.494.855,2900			

DAFTAR TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025

LAMPIRAN 5E

No.	Uraian Barang	Kode Barang	Reg.	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Jenis Hak	Tanggal Hak	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Asal Usul perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nama Perangkat Daerah	Lokasi Kab/Kota	Keterangan
1	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0005	0,00	2017	-					Pembelian	319.909.000,00	Dinas Pendidikan	Bintan	Pematangan Lahan Untuk SMA di Kelong Kec. Bintan Pesisir (SMAN 2 Bintan Pesisir)
2	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0011	0,00	2018	SLB di Anambas DESA ARUNG HIJAU KAB.ANAMBAS					Pembelian	186.836.000,00	Dinas Pendidikan	Anambas	Pematangan Lahan dan Pemasangan Batu Miring SLBN Anambas
3	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0012	0,00	2019	-					Pembelian	162.701.253,00	Dinas Pendidikan	Batam	Pematangan Lahan SMAN 21 Batam
4	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001		30-Dec-22						Pembelian	186.142.540,00	Dinas Pendidikan		
5	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001		30-Dec-22						Pembelian	186.159.931,00	Dinas Pendidikan		
6	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.00 1.004.002	0001		30-Dec-22						Pembelian	185.764.569,00	Dinas Pendidikan		
												1.227.513.293,0000			

Lampiran 6

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG TERCATAT DI KIB DAN TELAH DILENGKAPI BPKB

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	14		Suzuki	New Ertiga Dreza GS AT 2016	1400	-	MHYKZE81SHJ310619	K14BT1242346	BP 1636 A	M-10708521	Pembelian	15/06/2017	233.000.000,00
2	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	25		Toyota	All New Kijang Innova 2.0V A/T	2000 CC	-	MHFGW8EM9H1D3296	1TRA263440	BP 1568 A	M-11504232	Pembelian	26/05/2017	340.700.000,00
3	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		Hino	Karoseri Harmony 110 G	4009 cc	-	MJEC1JGXD50017410	W04DTPJA3209	BP 7131 A	K00548930	Pembelian	24/07/2013	392.500.000,00
4	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3		KIA	Mini Bus	2700	-	MJJTB73125K001858	J2424098	BP 1038 A	8492023D	Pembelian	31/12/2005	191.661.000,00
5	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4		Toyota	Kijang Innova G	2000 CC	-	MHFXW42G052011577	1TR6024237	BP 1138 A	D-2645978	Pembelian	31/12/2004	225.900.000,00
6	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	1		Toyota	Hilux Double cabin 4x4 3.0 G MT	2400 CC	-	MROFZ29G5A1584403 3	1KD6485549	BP 8018 A	3879799D	Pembelian	31/12/2010	333.960.000,00
7	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		HONDA	VARIO	125 CC	-	MH1JF9119AK097505	JF91E1099330	BP 2136 A	H06212387	Pembelian	31/12/2010	17.380.000,00
8	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		HONDA	VARIO	125 CC	-	MH1JF911XAK097576	JF91E1099055	BP 2135 A	H06212386	Pembelian	31/12/2010	17.380.000,00
9	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	9		Toyota	Hiace Comuter	2982 cc	-	JTFSS22PXH0167705	2KD A942442	BP 7209 A	M11509118	Pembelian	20/09/2017	440.000.000,00
10	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	10		Toyota	Hiace Comuter	2982 cc	-	JTFSS22P8H0167735	2KD A940061	BP 7210 A	M11509119	Pembelian	20/09/2017	440.000.000,00
11	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	11		Toyota	Grand New Veloz	1500 CC	-	MHKM5FB4JHK014434	2NR F617732	BP 1662 A	M11509115	Pembelian	20/09/2017	232.800.000,00
12	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	12		Toyota	Grand New Veloz	1500 CC	-	MHKM5FB4JHK014174	2NR F615474	BP 1663 A	M11509116	Pembelian	20/09/2017	232.800.000,00
13	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	8		MITSUBI SHI	PAJERO SPORT 2.4L DAKAR (4X2) BA/T ASSY YEAR 2017	2400 CC	-	MK2KRWPNUHJ006220	4N15UCA2757	BP 1680 A	M11513575	Pembelian	07/12/2017	488.670.550,00
14	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	9		MITSUBI SHI	PAJERO SPORT 2.4L DAKAR (4X2) BA/T ASSY YEAR 2017	2400 CC	-	MK2KRWPNUHJ006503	4N15UBY2171	BP 1682 A	M11513577	Pembelian	07/12/2017	488.670.550,00
15	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	10		MITSUBI SHI	PAJERO SPORT 2.4L DAKAR (4X2) BA/T ASSY YEAR 2017	2400 CC	-	MK2KRWPNUHJ006514	4N15UBY2697	BP 1681 A	M11513576	Pembelian	07/12/2017	488.670.550,00
16	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	17		Toyota	Kijang Innova G At Luxury Bensin	1988	-	MHFXW42G9C2231359	1TR7357776	BP 1603 A	J-00056008	Pembelian	10/02/2012	259.500.000,00
17	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	5		Toyota	Innova	2000 CC	-	MHFXW43G8F4096057	1TR8883165	BP 1370 A	L07296130	Pembelian	12/10/2015	327.000.000,00
18	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6		Toyota	Innova	2000 CC	-	MHFXW43GXF4096366	1TR8892115	BP 1371 A	L07296131	Pembelian	12/10/2015	327.000.000,00
19	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7		Toyota	Innova	2000 CC	-	MHFXW43G6F4096283	1TR8890766	BP 1372 A	L07296132	Pembelian	12/10/2015	327.000.000,00
20	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	8		Toyota	Innova	2000 CC	-	MHFXW43G3F4096306	1TR8890965	BP 1373 A	L07296133	Pembelian	12/10/2015	327.000.000,00
21	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.2	Jeep	1		Suzuki	Grand Vitara	1500 CC	-	JSAJTEA4VG4100022	J24B1303743	BP 1324 A	L11192500	Pembelian	08/06/2016	369.543.000,00
22	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.2	Jeep	2		Toyota	Rush A/T 1.5 VIN	1500 CC	-	MHFE2CK3JFK033829	3SZDFN6891	BP 1512 A	L -11192473	Pembelian	08/06/2016	250.450.000,00
23	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.2	Jeep	3		Toyota	Fortuner 2.7SRZ	2694	-	MHFGX8GS9G0501094	2TRA134748	BP 1537 A	L-10608407	Pembelian	08/06/2016	491.450.000,00
24	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	1		Toyota	Veloz 1.5 A/T VIN	1500 CC	-	MHKM5FB4JGK005855	2NRF540239	BP 1507 A	L - 10630962	Pembelian	08/06/2016	219.700.000,00
25	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	2		Toyota	Veloz 1.5 A/T VIN	1500 CC	-	MHKM5FB4JGK005860	2NRF540364	BP 1508 A	L - 10630963	Pembelian	08/06/2016	219.700.000,00
26	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	3		Toyota	Veloz 1.5 A/T VIN	1500 CC	-	MHKM5FB4JGK006289	2NRF545440	BP 1509 A	L - 10630964	Pembelian	08/06/2016	219.700.000,00
27	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	4		Toyota	Veloz 1.5 A/T VIN	1500 CC	-	MHKM5FB4JGK006792	2NRF548922	BP 1510 A	L - 10630965	Pembelian	08/06/2016	219.700.000,00
28	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	5		Toyota	Veloz 1.5 A/T VIN	1500 CC	-	MHKM5FB4JGK006378	2NRF546107	BP 1513 A	L10630966	Pembelian	08/06/2016	219.700.000,00
29	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	6		Toyota	Veloz 1.5 A/T VIN	1500 CC	-	MHKM5FB4JGK004881	2NRF533446	BP 1517 A	L11194652	Pembelian	08/06/2016	219.700.000,00
30	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	7		Toyota	Veloz 1.5 A/T VIN	1500 CC	-	MHKM5FB4JGK006552	2NRF547333	BP 1518 A	L10630967	Pembelian	08/06/2016	219.700.000,00
31	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	2		Toyota	Camry	3000	-	MB053XX3054000577	IMZ-831366	BP 1212 A	L - 9542560	Pembelian	01/07/2004	432.313.600,00
32	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	2		TOYOTA	NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G	2400 CC	-	MROKB8CD7J1206400	2GD 4503399	BP 8216 A	N09130769	Pembelian	28/12/2018	418.300.000,00
33	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	11		Toyota	New Avanza 1.3 G A/T VIN 2019	1300 CC	-	MHKM5EB3JKK025719	1NR G034991	-BP 1780 A	P01944192	Pembelian	08/11/2019	214.000.000,00
34	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	12		Toyota	New Avanza 1.3 G A/T VIN 2019	1300 CC	-	MHKM5EB3JKK025190	1NR G027382	BP 1781 A	P01944193	Pembelian	08/11/2019	214.000.000,00
35	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	13		Mitsubish i	Xpander 1.5L Ultimate (4X2) A/T	1500 CC	-	MKN2CWTARKJ021916	4A91HC0542	BP 1731 A	N09142550	Pembelian	08/11/2019	259.000.000,00
36	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	1		Toyota	New Camry 2.5 V A/T Full Model Change VIN 2	2500 cc	-	MR2BF3HK1K4002214	2136684	BP 1348 A	P01944585	Pembelian	08/11/2019	619.000.000,00
37	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	13		Toyota	New Avanza Veloz 1.5A/T	1500	-	MHKM5FB4JLK028558	2NRG512763	BP 1801 A	P-01949005	Pembelian	29/05/2020	233.000.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	14		Toyota	All New Kijang Innova Venturer 2.0 Q A/T	2000	-	MHFAW8EM4L0215144	1TRA749152	BP 1896 A	P-01949006	Pembelian	29/05/2020	413.000.000,00
39	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	8		Toyota	Camry Hybrid 2,5 HV AT	2494 CC	-	MR2B53HK1M4010125	A25A0863562	BP1038 AA	R02845223	Pembelian	06/08/2021	842.050.000,00
40	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	22		Mitsubishi	Pajero Sport Dakar SUV 4x2 A/T	2442 CC	-	MK2KRWPNUMJ003583	4N15UHG5430	BP 1034 AA	Q 02420920	Pembelian	06/08/2021	686.400.000,00
41	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	23		Mitsubishi	Pajero Sport Dakar SUV 4x2 A/T	2442 CC	-	MK2KRWPNUMJ003479	4N15UHG6382	BP 1035 AA	Q 02420921	Pembelian	06/08/2021	686.400.000,00
42	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	24		Toyota	Innova Venturer MPV 2,4 MT Diesel	2393 CC	-	MHFAB3EM7M0020428	2GDC861164	BP 1037 AA	R02845222	Pembelian	06/08/2021	486.750.000,00
43	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.2	Jeep	4		Toyota	Fortuner	2694	-	MROZX69G760009522	2TR-6288626	BP 1006 A	E-1503896D	Pembelian	25/01/2006	308.180.400,00
44	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	18		Toyota	Avanza 1.3 G A/T	1298	-	MHFM1BB3JBK013445	DH78843	BP 1569 A	H-08395033	Pembelian	21/09/2011	176.000.000,00
45	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	19		Toyota	Avanza 1.3 G A/T	1298	-	MHFMIBB3JBKOI3564	DH93826	BP 1215 A	H-08395036	Pembelian	21/09/2011	176.000.000,00
46	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	20		Toyota	Avanza 1.3 G A/T	1298	-	MHFMIBB3JBKOI3583	DH93893	BP 1216 A	H-08395037	Pembelian	21/09/2011	176.000.000,00
47	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	9		Toyota	Camry	2.4 V A/T	-	MR053BK40B9010758	2AZE216443	BP 1262 A	I-04199466	Pembelian	18/08/2011	525.800.000,00
48	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	4		Toyota	Camry 2.5 V A/T	2500	-	MR053AK50D4502306	2AR-U021616	BP 1583 A	K-06976330	Pembelian	11/03/2014	594.550.000,00
49	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	5		Toyota	Camry 2.5 V A/T	2500	-	MR053AK50D4502004	2AR-0798436	BP 1549 A	K-06976332	Pembelian	11/03/2014	594.550.000,00
50	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	6		Toyota	Camry 2.5 V A/T	2500	-	MR053AK50D4502932	2AR-U038576	BP 1582 A	K-06976331	Pembelian	11/03/2014	594.550.000,00
51	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	16		Toyota	All New Kijang VENTURER 2.0 A/T Bensin VIN	2000	-	MHFAW8EM5J0209365	1TRA429216	BP 1729 A	M-11518724	Pembelian	02/07/2018	395.300.000,00
52	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	15		Toyota	Grand New Avanza 1.3 E A/T Vin 2017	1300	-	MHKM5EB2JHK005412	1NRF311099	BP 1648 A	M11506697	Pembelian	28/07/2017	199.000.000,00
53	Sekretariat Dprd	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	21		Toyota	Avanza 1.5 A/T Vin 2.5 V A/T	1500	-	MHKM5FB4JGK006159	2NRF544376	BP 1521 A	L-10630971	Pembelian	23/05/2016	219.700.000,00
54	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	4		Toyota Avanza	New Veloz	1.5 A/T-Vin	-	MHKM5FB4JGK007098	2NRF550595	BP 1628 A	L10630968	Pembelian	23/05/2016	219.700.000,00
55	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		Toyota	Avanza 1300 G	1300	-	MHFMIB43J7K057035	DC 41060	BP 1159 A	E6709680	Pembelian	03/12/2007	150.700.000,00
56	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3		TOYOTA	Inova Luxury GA/T	1998	-	MHFXW42G2E2292698	1TR7824214	BP 1264 A	K-06998250	Pembelian	18/06/2014	281.350.000,00
57	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		Suzuki	Thunder	125 CC	-	MH8EN125A7J-359420	F405-ID-359305	BP 6013 A	N-6709741	Pembelian	03/12/2007	18.150.000,00
58	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		Suzuki	Thunder	1250CC	-	MH8EN125A7J-359037	F405-ID-359459	BP 6014 A	N-6709742	Pembelian	03/12/2007	18.150.000,00
59	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3		Suzuki	Thunder	125 CC	-	MH8EN125A7J359037	F405-ID-359459	BP 6016 A	E6709743D	Pembelian	03/12/2007	18.150.000,00
60	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	4		Suzuki	New Shogun	125 CC	-	MH1JBG116CK086755	JBG1E1086410	BP 2648 A	J-06502840	Pembelian	03/12/2007	17.050.000,00
61	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	5		Honda	Supra X	125 CC	-	MH1JFC110CK153735	JFC1E1154511	BP 2647 A	J-06502841	Pembelian	21/11/2012	15.508.000,00
62	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	6		Honda	supra x	125 CC	-	MH1JBG110CK093989	JBG1E1093487	BP 2649 A	J-06502838	Pembelian	21/11/2012	15.508.000,00
63	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	7		Honda	Vario	150 CC	-	MH1KC411XDKI21525	KC41E1121476	BP 2405 A	K-10987451	Pembelian	21/11/2012	15.230.000,00
64	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	8		SUZUKI	CN 125	125 CC	-	MH8EN125A7J359420	F405-ID-359305	BP 6015 A	E6709740D	Pembelian	03/12/2013	22.640.000,00
65	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	1		TOYOTA	NEW RUSH 1.5 S A/T TRD VIN 2019	1500 CC	-	MHKEBFB3JKJ002603	2NRF917728	BP 1695 A	P01944039	Pembelian	15/11/2019	259.000.000,00
66	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	3		Toyota	Innova	1988	-	MHFXW42GX5217371	1TR-6041415	BP 24 A	2645809	Pembelian	21/03/2005	188.090.909,00
67	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	2		Toyota	Kijang innova	2000 CC	-	MHFXW42G462071878	1TR-6288377	BP 86 A	E-0739579	Pembelian	21/03/2005	188.090.909,00
68	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.3.2.2.1.1.2	Jeep	1		Toyota	Avanza 1300 G	1300 CC	-	MHFM1BA3JBK319319	DH50407	BP 1210 A	-	Pembelian	13/06/2011	188.980.000,00
69	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.1.2	Jeep	2		Toyota	Innova G A/T	2000 CC	-	MHFXW426842006173	1TR601785	BP 14 A/BP 200 A	D-1788924	Hibah	05/05/2004	225.900.000,00
70	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.3.2.2.1.1.2	Jeep	3		Toyota	Innova G A/T	2000 CC	-	MHFXW426352013212	ITR-6025723	BP 1335 A	D--2645984	Hibah	05/05/2004	225.900.000,00
71	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.3.2.2.1.1.2	Jeep	4		Toyota	Innova G A/T	2000 CC	-	MHFXW42G952013635	1TR-6025801	BP 21 A	D-2645985	Hibah	05/05/2004	225.900.000,00
72	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.3.2.2.1.2.2	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1		ISUZU	NHR 55CO E2	2771 CC	-	MHCNH55EYCJ044898	M044898	Bp 7104 A	J-02142281	Pembelian	06/01/2012	467.500.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		Toyota	Inova seri G luxsuri	2000cc	-	MHFXW43G8D4082771	1TR-7689064	Bp 1423A	K-00548763	Pembelian	06/01/2014	297.225.088,00
74	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		Honda	Supra X 125 R NF 125 SC	125 CC	-	MHIJB52I87K352723	JB52E-1352033	BP 3049 A	E-8031090	Pembelian	13/07/2007	14.936.000,00
75	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		HONDA	125X	125 CC	-	MHIJBB1158K193776	JB81E1191115	BP 2017 A	F-1220553	Pembelian	30/07/2009	14.966.000,00
76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	1		Toyota	Avanza	1300 CC	-	MHFMIBA3J8K093916	DD06692	BP 1134 A	F-1780072	Pembelian	30/12/2008	150.480.000,00
77	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3		Honda	Supra X 125 d	125 CC	-	MHIJBB1188K143529	JB81E1141435	BP 2018 A	F-1220554	Pembelian	30/12/2008	15.994.000,00
78	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	4		Honda	Supra X 125 d	125 CC	-	MHIJBB113BK143541	JB81E-1141396	BP 2019 A	F-1220555	Pembelian	30/12/2008	15.994.000,00
79	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	5		Honda	Supra X 125 d	125 CC	-	MHIJB91169K604349	JB91E-1601975	BP 2201 A	H-06877657	Pembelian	30/12/2008	15.994.000,00
80	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		TOYOTA	INNOVA	1988	-	MHFXW42G-552052349	1TR-6176195	BP 1221 A	D 9542554 D	Pembelian	07/12/2005	225.900.000,00
81	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2		KIA-TRAVELLO	TRAVELLO K 2700 CHASIS	2665	-	MJJSD21127K002112	J2478669	BP 7006 A	4602057-D	Pembelian	04/12/2007	189.695.999,72
82	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3		TOYOTA AVANZA	AVANZA 1500 s (F602RMGMSFJJ)	1498	-	MHFM1CA4JBK057744	DCG8402	BP 1380 A	I 04618887 D	Pembelian	01/12/2011	198.550.000,00
83	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	1		ISUZU	TBR 54 PRLC (PANTHER/BONET)	2499	-	MHCTBR54B7K137500	E-137500	BP 8011 A	4602056-D	Pembelian	04/12/2007	134.730.000,00
84	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	2		MITSUBISHI	STRADA 2.8 AMDCGLXMT	2835	-	MMBJNKB70BD048422	4M40UAC4614	BP 8121 A	I-04194214 D	Pembelian	01/12/2011	393.800.000,00
85	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	3		FORD	DOUBLE CABIN	2000	-	MNBDMFF80CW134396	P4ATI063343	BP 8148 A	K-06968701	Pembelian	03/09/2013	440.550.000,00
86	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	4		FORD	DOUBLE CABIN	2000	-	MNBDMFF80CW134396	P4ATI063293	BP 8049 A	k-06968702	Pembelian	03/09/2013	440.550.000,00
87	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.6.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	1		Toyota	Dyna 6 RD 110 ET PS	4009cc	-	MHFC1JU41B5025506	WO4DTPJ19185	BP 8097 A	H-09675813	Pembelian	29/12/2011	440.000.000,00
88	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	13		Honda	New Street Fire	150 CC	-	MH1KF111XGK573002	KF11E1576107	BP 2470 A	M-05212905	Pembelian	25/04/2016	25.063.000,00
89	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	14		Honda	New Street Fire	150 CC	-	MH1KC8115GK092768	KC81E1092277	BP 2471 A	M-05212906	Pembelian	25/04/2016	25.063.000,00
90	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	15		Honda	Vario 150 ESP	150 CC	-	MH1JFV112GK324292	JFV1E1327601	BP 2473 A	M-05213058	Pembelian	25/04/2016	20.693.000,00
91	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	16		Honda	Vario 150 ESP	150 CC	-	MH1JFV111GK322551	JFV1E1325651	BP 2472 A	M-05213059	Pembelian	25/04/2016	20.693.000,00
92	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	17		Honda	Vario 150ESP	150 CC	-	MH1KC8112GK094896	KC81E1094563	BP 2468 A	M-05212903	Pembelian	25/04/2016	18.442.000,00
93	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	18		Honda	Vario 150ESP	150 CC	-	MH1KF1115GK616418	KF11E1615404	BP 2469 A	M-05212904	Pembelian	25/04/2016	18.442.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
94	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	5		TOYOTA	HILUX	2400 CC	-	MR0AS12G2F0016130	2KDU729018	BP 8029 A	L03562932	Pembelian	14/04/2015	200.150.000,00
95	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	19		HONDA	VARIO 125 CBS ISS	125 CC	-	MH1JFV113GK507099	JFV1E1513601	BP 3350 A	M-06799385	Pembelian	13/12/2016	18.442.000,00
96	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	20		HONDA	VARIO 125 CBS ISS	125 CC	-	MH1JFV113GK483452	JFV1E1490153	BP 2476 A	M-06799387	Pembelian	13/12/2016	18.442.000,00
97	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	21		HONDA	VARIO 125 CBS ISS	125 CC	-	MH1JFV114GK490703	JFV1E1496781	BP 2478 A	M-06799389	Pembelian	13/12/2016	18.442.000,00
98	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	22		HONDA VARIO	VARIO 125 CBS ISS	125 CC	-	MH1JFV118GK483401	JFV1E1490122	BP 2479 A	M-06799390	Pembelian	13/12/2016	18.442.000,00
99	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	23		HONDA	VARIO 125 CBS ISS	125 CC	-	MH1JFV111GK483434	JFV1E1490148	BP 2480 A	M-06799391	Pembelian	13/12/2016	18.442.000,00
100	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	24		YAMAHA	N-MAX	150 CC	-	MH3SG3190JK341855	G3E4E1141860	BP 5246 A	P-01883259	Pembelian	05/03/2019	27.912.000,00
101	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	25		YAMAHA	N-MAX	150 CC	-	MH3SG3190JK385528	G3E4E1197117	BP 5247 A	P-01883260	Pembelian	05/03/2019	27.912.000,00
102	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	26		YAMAHA	N-MAX	150 CC	-	MH3SG3190JK384408	G3E4E1193374	BP 5245 A	P-01883258	Pembelian	05/03/2019	27.912.000,00
103	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	27		YAMAHA	FINO	110 CC	-	MH3SE88F0JJ033508	E3WGE0161994	BP 5240 A	P-01883222	Pembelian	05/03/2019	19.826.000,00
104	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	28		YAMAHA	FINO	110 CC	-	MH3SE88F0JJ033543	E3WGE0162031	BP 5241 A	P-01883223	Pembelian	05/03/2019	19.826.000,00
105	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	29		YAMAHA	FINO	110 CC	-	MH3SE88F0JJ033527	E3WGE0162017	BP 5242 A	P-01883224	Pembelian	05/03/2019	19.826.000,00
106	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4		TOYOTA	INOVA	2000 CC	-	MHFJW8EM9K2375569	ITRAG77015	BP 1870 A	N-09142561	Pembelian	11/10/2019	321.000.000,00
107	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.2.5	kendaraan bermotor penumpang lainnya (dst)	1		SUZUKI APV	APV GX MT	1493	-	MHYGDN42VLJ402192	G15AID438671	BP 1027 AA	Q-08874671	Pembelian	18/06/2021	200.000.000,00
108	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.6.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	2		Toyota	Dyna 6 RD 110 ET PS	4009cc	-	MHFC1JU41B5026367	WO4DTPJ19406	BP 8098 A	H-09675814	Pembelian	29/12/2011	440.000.000,00
109	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		YAMAHA	YAMAHA 5 BP Z SCORPIO	223	-	MH35BP0047K076958	5BP-077050	BP 4103 A	3115845 D	Pembelian	03/12/2007	24.750.000,00
110	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		YAMAHA	YAMAHA 5 BP Z SCORPIO	223	-	MH35BP0047K079197	5BP-079281	BP 4102 A	3115846 D	Pembelian	03/12/2007	24.750.000,00
111	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3		HONDA	SUPRA X NF 125 TR	125	-	MH1JB91179K684342	JB91E1681483	BP 4021 A	4512509 D	Pembelian	01/12/2009	15.800.400,00
112	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	4		HONDA TIGER	TIGER	200	-	MH1MC22199K020771	MC22E-1020753	BP 4020 A	4512508 D	Pembelian	01/12/2009	25.790.600,00
113	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	5		HONDA BEAT CW	BEAT CW NC11B3C A/T	110	-	MH1JF5122CK71180	JF51E-2699721	BP 2673 A	I 08682163 D	Pembelian	03/12/2012	12.081.000,00
114	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	6		HONDA BEAT CW	BEAT CW NC11B3C A/T	110	-	MH1JF5124CK938232	JF51E2914426	BP 2672 A	I-08682164	Pembelian	03/12/2012	12.081.000,00
115	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	7		HONDA BEAT CW	BEAT CW NC11B3C A/T	110	-	MH1JF5129CK720853	JF51E2698617	BP 2674 A	I-08682162	Pembelian	03/12/2012	12.081.000,00
116	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	8		KAWASAKI D-TRACKER 150	D-TRACKER 150	150 CC	-	MH4LX150DDKP17026	LX150CEPA7374	BP 6034 A	K 00551028	Pembelian	02/12/2013	28.300.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
117	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	9		KAWASAKI D-TRACKER 150	D-TRACKER 150	150 CC	-	MH4LX150DDKP17334	LX150CEPA8587	BP 6035 A	K 00551027	Pembelian	02/12/2013	28.300.000,00
118	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	10		HONDA	TYPE CB 150 R STREET FIRE / BLACK	150 CC	-	MH1KC4118DK173462	KC41E1173530	BP 2194 A	L-03552767	Pembelian	02/12/2013	22.640.000,00
119	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	11		HONDA	TYPE CB 150 R STREET FIRE / WHITE	150 CC	-	MH1KC4113DK126209	KC41E1125993	BP 2193 A	L-03552766	Pembelian	02/12/2013	22.640.000,00
120	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	12		kawasaki	D-Tracker 150	150 CC	-	-	-	BP 6203 A	-	Pembelian	30/04/2014	30.500.000,00
121	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2		Toyota Kijang	Toyota Innova G AT	1998 cc	-	MHFXW42G662070103	1TR-6277219	BP 45 A	E-0739557	Pembelian	12/01/2005	175.409.091,00
122	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		HONDA NF 125 FD	NF 125 FD (NEW SUPRA X)	125 cc	-	MH1JB81138K257913	JB81E.1254442	BP 2045 A	F-1780977	Pembelian	20/06/2008	13.526.700,00
123	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3		HONDA	ND 1100 (VARIO RACING)	110 CC	-	MH1JF12138K359206	JF12E-1363433	BP 2046 A	F No-1780976	Pembelian	20/06/2008	14.330.700,00
124	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	4		yamaha	nmax	155 cc	-	MH3SG3120HK438759	G3E4E0610668	Bp 4607 A	M-11513987	Pembelian	13/11/2017	27.300.000,00
125	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	5		YAMAHA	AEROX VVA S-VERSION VIN 2018	155 CC	-	MH3SG4640JJ034570	G3J8E0039539	BP 5243 A	P-01883250	Pembelian	27/12/2018	29.595.000,00
126	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	1		daihatsu	xenia f 601 RV GMDFJJ	1500 CC	-	MHKV1B4227K012725	DC41524	BP 1158 A	E-6709979	Pembelian	24/12/2007	134.400.000,00
127	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		Toyota Kijang	Kijang Innova G A/T	1998 cc	-	MHFXW42G352011766	1TR-6023873	BP 79 A	D2645978	Pembelian	26/12/2005	225.900.000,00
128	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		Honda GL	GL 2000D Tiger Spoke	200 cc	-	MH1MC111X7K020612	MC11E.1019719	BP 3050 A	E-8031167	Pembelian	24/12/2007	19.142.000,00
129	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	8		Honda	New Vario 125 Esp-CBs Iss	125 CC	-	MH1JFV118HK579417	JFV1E1583596	BP 2265 A	M11528296	Pembelian	30/05/2017	18.442.000,00
130	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	1		Toyota	ALL New Inova Venturer 2.0 A	2000 CC	-	MHFAW8EM9H0207287	1TRA325019	BP 1647 A	M1150436	Pembelian	07/08/2017	395.300.000,00
131	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		Toyota	Innova Venturer 2.4 A/T Hitam Metalik	2393	-	MHFAB3EM1K0014881	2GDC656222	BP 1647 A/BP 1809 A	P-01944132	Pembelian	05/12/2019	450.000.000,00
132	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		Honda	Verza Spoke	150	-	KC5118DK020053	KC51E1020132	BP 2172 A/BP 2109 A	L-03552629	Pembelian	17/10/2013	16.609.000,00
133	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		Honda	Verza Spoke	150	-	KC5116DK020018	KC51E1020073	BP 2170 A/BP 2108 A	L-03552629	Pembelian	17/10/2013	16.609.000,00
134	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3		Kawasaki	KLX150S	150	-	MH4LX150CBKP35632	LX150CEP55292	BP 6125 A	I-08425591	Pembelian	03/11/2011	35.750.000,00
135	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	4		Kawasaki	KLX150S	150	-	MH4LX150CBKP34571	LX150CEP52866	BP 6124 A	I-08425592	Pembelian	03/11/2011	35.750.000,00
136	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	5		Honda	Supra X 125 R	125	-	MH1JB9120BK725084	JB91E-2715935	BP 2437 A	I 08425593 D	Pembelian	03/11/2011	20.900.000,00
137	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	6		HONDA	Supra Fit X	110 CC	-	MH1HB71158K464070	HB71E1461081	BP 2043 A	1780322	Pembelian	31/07/2008	15.378.000,00
138	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	7		HONDA	Supra Fit X	110 CC	-	MH1HB71148K463962	HB71E1461090	BP 2044 A	1780323	Pembelian	31/07/2008	15.378.000,00
139	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	1		Toyota Toyota Inova	Innova G AT	1988 cc	-	MHFXW42GX72100494	1TR-6432756	BP 64 A	E7523322	Pembelian	25/04/2007	211.070.200,00
140	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	2		TOYOTA	Avanza Veloz 1.5 A/T New	1500	-	MHKMICB4JDKO28307	3SZ-DEC5113	BP 1429 A	K-00548768	Pembelian	18/09/2013	191.442.663,00
141	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		Honda	Supra X 125 PGM F1	125	-	MHIJB01179K076509	JB01E1075251	BP 3710 A	F4512362	Pembelian	06/10/2009	16.053.000,00
142	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		Honda	Supra X 125 PGM F1	125	-	MHIJB01199K080187	JB01E1078935	BP 3712 A	F4512361	Pembelian	06/10/2009	16.053.000,00
143	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3		Honda	Vario Techno 125 F1	125	-	MHIJFF118DK229804	JFFE1231518	BP 2169 A	L03552628	Pembelian	07/10/2013	16.411.000,00
144	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	14		Toyota	Avanza / 1.3 S A/T	1299 cc	-	MHFM1BA3J6K005696	DB63056	BP 1012 A	2824036	Pembelian	08/02/2006	135.286.800,00
145	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	1		TOYOTA	CAMRY V A/T	IL4,16VALVE,DOHC DUAL VVT-1 , ISI SLINDER	-	MR053AK50D4502246	2AR0815403	BP 1435 A	K 00549053	Pembelian	30/12/2013	549.500.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
146	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		HONDA GL PRO	160 D	160 CC	-	MH1KC1210AK250592	KC12E1248432	BP 3036 A	H-3658949D	Pembelian	29/11/2010	20.900.000,00
147	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		SUZUKI	FL 125 RCDF	125 CC	-	MH8BF45PA8J100538	F4A6-ID100509	BP 6003 A	F-4762684D	Pembelian	28/08/2009	17.083.000,00
148	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3		SUZUKI	FL 125 RCDF	125 CC	-	MH8BF45PA8J104467	F4A6-ID104434	BP 6007 A	F-4762691D	Pembelian	28/08/2009	17.083.000,00
149	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	4		SUZUKI	SHOGUN INJECTION FI	125 CC	-	MH8BF45PA8J103021	F4A6-ID103015	BP 6006 A	F-4762690D	Pembelian	28/08/2009	17.083.000,00
150	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	5		Toyota	GRAND NEW AVANZA VELOZ	1497 cc	-	MHKM5FB4JHK015677	2NRF628334	BP 1678 A	M-11510116	Pembelian	20/11/2017	212.800.000,00
151	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	26		Honda	NEW VERZA (HITAM)	150 CC	-	MH1KC5216GK299036	KC52E1296444	BP 3957 K	M11534670	Pembelian	14/06/2017	19.210.000,00
152	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	27		Honda	Honda New Verza 150	150 CC	-	MH1KC5218GK307637	KC52E1303929	BP 3958 K	M11534671	Pembelian	14/06/2017	19.210.000,00
153	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	28		Honda	NEW VERZA (HITAM) 150 CW	150 CC	-	MH1KC521XGK287715	KC52E1285141	BP 2493 A	M11519940	Pembelian	12/06/2017	19.210.000,00
154	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	29		Honda	NEW VERZA (HITAM) 150 CW	150 CC	-	MH1KC521XGK307476	KC51E1304071	BP 2494 A	M11519941	Pembelian	12/06/2017	19.210.000,00
155	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3		Toyota	Avanza 1,5 Veloz A/T (Putih)	1496 cc	-	MHKM5FB4JHK011573	2NRF594971	BP 1522 A	M-11504212	Pembelian	08/05/2017	219.700.000,00
156	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4		TOYOTA	KIJANG INNOVA (PUTIH)	2000 CC	-	MHFAW8EM0G020423 0	1TRA188110	BP 1594 A	M-11504213	Pembelian	08/05/2017	379.150.000,00
157	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	12		HONDA	NEW VARIO	150 CC	-	MH1KF1125HK047032	KF11E2043625	BP 2037 A	M - 10711750	Pembelian	09/05/2017	18.938.000,00
158	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	13		Honda	73161600-KDR-000021288, 150 CW - PRODUKSI TAHUN 20	150 cc	-	MH1KC5212GK307567	KC52E1303983	BP 2406 A	M10721815	Pembelian	16/06/2017	19.210.000,00
159	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	14		Honda	73161600-KDR-000021288, 150 CW - PRODUKSI TAHUN 20	150 CC	-	MH1KC521XGK297127	KC52E1294628	BP 2407 A	M 10721816	Pembelian	16/06/2017	19.210.000,00
160	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	15		Honda	73161600-KDR-000021288, 150 CW - PRODUKSI TAHUN 20	150 CC	-	MH1KC5210GK307597	KC52E1304057	BP 2408 A	M 10721817	Pembelian	16/06/2017	19.210.000,00
161	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	16		Honda	150 SPOKE - PRODUKSI TAHUN 2016		-	MH1KC5113GK085378	KC51E1085298	BP 2202 A	M10714288	Pembelian	05/07/2017	16.819.000,00
162	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	17		Honda	150 SPOKE - PRODUKSI TAHUN 2016	150CC	-	MH1KC5116HK090270	KC51E1090090	BP 2177 A	M10714283	Pembelian	05/07/2017	16.819.000,00
163	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	18		HONDA	NEW VERZA 150 SPOKE	150 CC	-	MH1KC5110GK080607	KC51E1080907	BP 2200 A	M10714287	Pembelian	05/07/2017	16.819.000,00
164	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	19		Honda	HONDA NEW VERZA 150 SPOKE	150 CC	-	MH1KC5110HK089969	KC51E1089809	BP 2181 A	M10714284	Pembelian	05/07/2017	16.819.000,00
165	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	20		HONDA	NEW VERZA 150 SPOKE		-	MH1KC5117GK080538	KC51E1080765	BP 2199 A	M10714286	Pembelian	05/07/2017	16.819.000,00
166	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	21		Honda	NEW VERZA 150 SPOKE	150 CC	-	MH1KC5110HK091009	KC51E1090878	BP 2191 A	M10714285	Pembelian	05/07/2017	16.819.000,00
167	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	22		Honda	Honda New Verza 150 (Putih)	150 CC	-	MH1KC521XGK289335	KC52E1287463	BP 3675 N	M10701941	Pembelian	12/06/2017	19.710.000,00
168	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	23		Honda	NEW VERZA 150 CW	150 CC	-	MH1KC5212GK299244	KC52E1296709	BP 2518 L	M11526956	Pembelian	12/06/2017	19.210.000,00
169	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	24		Honda	NEW VERZA 150 CW	150 CC	-	MH1KC5216GK299229	KC52E1296694	BP 2519 L	M11526957	Pembelian	12/06/2017	19.210.000,00
170	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	25		Honda	NEW VERZA (HITAM) 150 CW	150 CC	-	MH1KC5217GK292774	KC52E1289750	BP 3959 K	M11534672	Pembelian	12/06/2017	19.210.000,00
171	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.6.11 0	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	1		ISUZU	NHR 55 CO EZ-1	2772 cc	-	MHCNHR55EHJ074311	M074311	BP 8311 A	M11510280	Pembelian	28/12/2017	445.000.000,00
172	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.6.11 0	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	2		ISUZU	NHR 55 CO EZ-1	2772 cc	-	MHCNHR55EHJ074310	M074310	BP 8312 A	M11510281	Pembelian	28/12/2017	445.000.000,00
173	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	18		TOYOTA	RUSH 1.5 AT	1496 CC	-	MHKE8FB3JLK042504	2NR G549079	BP 1918 A	P-01955270	Pembelian	07/12/2020	232.000.000,00
174	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	19		TOYOTA	RUSH	1496 CC	-	MHKE8FB3JLK042611	2NR G554626	BP 1312 A	P - 01955318	Pembelian	07/12/2020	232.000.000,00
175	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	20		TOYOTA	RUSH	1496 CC	-	MHKE8FB3JLK042629	2NR G555649	BP 1314 A	P - 01955319	Pembelian	07/12/2020	232.000.000,00
176	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	21		TOYOTA	RUSH	1496 CC	-	MHKE8FB3JLK042685	2NR G558274	BP 1323 A	P - 01955321	Pembelian	07/12/2020	232.000.000,00
177	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	22		TOYOTA	RUSH	1496 CC	-	MHKE8FB3JLK042686	2NR G556194	BP 1322 A	P - 01955320	Pembelian	07/12/2020	232.000.000,00
178	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	23		SUZUKI	APV LUXURY	1800	-	MHYGDN42VLJ 401758	G15AID 438213	BP 1331 A	P01955632	Pembelian	14/12/2020	198.000.000,00
179	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	55		HONDA VARIO	125 ISS WARNA HITAM	-	-	MH1JM512XNK129262	JM51E2128087	BP 3768 N	R 02858456	Pembelian	16/06/2022	22.943.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
180	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	1		TOYOTA	Inova V A/T Bensin Luxuri	1998 CC	-	MHFXW43G1D4077136	1TR7528237	BP 85 A	K-06969446	Pembelian	30/12/2013	277.475.000,00
181	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	2		TOYOTA	AVANZA VELOZ, 1.5 V A/T	1495 CC	-	MHKM1CB4JEK032922	DEK7040	BP 1127 A	L-03559237	Pembelian	16/07/2014	197.010.000,00
182	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	3		TOYOTA	NEW HILUX D-CAB 2.5 V A/T DIESEL	2494 CC	SOLAR	MROFR29G4E1032397	2KDA515615	BP 8017 A	L-03558269	Pembelian	16/07/2014	346.115.000,00
183	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	4		TOYOTA	KIJANG INOVA, V A/T LUXURI GASOLINE	1998 CC	-	MHFXW43G4E4087239	1TR7813931	BP 1817 A	L-03559238	Pembelian	16/07/2014	293.095.000,00
184	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	5		TOYOTA	RUSH 1.5 S	1500 cc	-	MHFE2CK3J9K005992	DBG7825	BP 1665 A	F-6718385D	Pembelian	29/09/2009	205.000.000,00
185	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	6		TOYOTA	AVANZA	1299 cc	-	MHFM1BA3J9K158133	DE16974	BP 1083 A	F-5535480D	Pembelian	29/09/2009	150.100.000,00
186	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	7		TOYOTA	AVANZA 1.3 G	1300 CC	-	MHFM1BA3J9K157139	DE15464	BP 1347 A	F-5535477D	Pembelian	29/09/2009	150.100.000,00
187	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	8		TOYOTA	AVANZA 1.3 G	1299 CC	-	MHFM1BA3J9K157408	DE16507	BP 1081 A	F-5535479D	Pembelian	29/09/2009	151.600.000,00
188	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	9		TOYOTA	AVANZA 1.3 G	1299 CC	-	MHFM1BA3J9K153373	DE09357	BP 1082 A	F-5535696D	Pembelian	29/09/2009	152.100.000,00
189	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	10		TOYOTA	AVANZA 1.3 G	1299 CC	-	MHFM1BA3595156115	DE14846	BP 1585 A	F-5535478D	Pembelian	29/09/2009	156.100.000,00
190	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.2.1	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	1		ISUZU ELF	NQR71 WB 4175	RODA 4, MEDIUM BUS WARNA MERAH, PJ:7355 MM,LB:2125	-	MHCN1R71LEJ059928	B 059928	BP 9796 A	L-03559213	Pembelian	30/10/2014	835.000.000,00
191	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		Toyota	Avanza New S	1500 cc	-	MHFM1CB4JAK010029	DBN8726	BP 105 A	F-6329539D	Pembelian	29/11/2010	191.180.000,00
192	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2		TOYOTA	KIJANG INNOVA G A/T	1998 cc	-	MHFXW42G552017178	1TR6039098	BP 26 A	D-2645968D	Pembelian	01/12/2004	225.900.000,00
193	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	5		SUZUKI	FL 125 RCDDF	125 CC	-	MH8BF45PA8J101591	F4A6-ID101679	BP 6005 A	F-4762689D	Pembelian	28/08/2009	17.083.000,00
194	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	6		SUZUKI	FL 125 RCDDF	125 CC	-	MH8BF45PA8J100617	F4A6-ID100619	BP 6004 A	F-4762688D	Pembelian	28/08/2009	17.083.000,00
195	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	7		SUZUKI	FL 125 RCDF	125 CC	-	MH8BF45PA8J100208	F4A6-ID100308	BP 6002 A	F-4762685D	Pembelian	28/08/2009	17.083.000,00
196	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	8		HONDA	HONDA NF 125 TD	125 CC	-	MH1JB81167K093913	JB81E-1095860	BP 2619 C	E-8301878D	Pembelian	03/12/2007	15.125.000,00
197	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	9		HONDA	NF 125 TD	1250CC	-	MH1JB81187K082718	JB81E-1085123	BP 2618 C	E-8301877D	Pembelian	03/12/2007	15.125.000,00
198	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	10		HONDA	NF 125 TD	125 CC	-	MH1JB81197K084476	JB81E-1086134	BP 2605 A	E-8301880D	Pembelian	03/12/2007	15.125.000,00
199	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	11		HONDA	NF 125 TD	125 CC	-	MH1JB81177K108077	JB81E-1109715	BP 2607 C	E-8301879D	Pembelian	03/12/2007	15.125.000,00
200	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	56		HONDA VARIO	VARIO 125 ISS WARNA HITAM	-	-	MH1JM512XNK129987	JM51E2128149	BP 2127 S	R02856458	Pembelian	16/06/2022	22.943.000,00
201	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	12		DAIHATSU	GRAN MAX PU 1.5 AC PU	1496 CC	-	MHKP3FA1JNK000698	2NRG869954	BP 8275 A	-	Hibah	12/12/2022	350.000.000,00
202	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	57		N-MAX - YAMAHA ALL NEW NMAX 155 CONNECTED ABS	YAMAHA ALL NEW NMAX 155 CONNECTED ABS VERS	-	-	-	-	-	-	Pembelian	10/03/2023	35.540.000,00
203	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	58		N-MAX - YAMAHA ALL NEW NMAX 155 CONNECTED ABS	YAMAHA ALL NEW NMAX 155 CONNECTED ABS VERS	-	-	-	-	-	-	Pembelian	10/03/2023	35.540.000,00
204	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	59		VARIO 160 CBS WARNA BLACK	160 CBS	-	-	-	-	-	-	Pembelian	27/11/2023	25.840.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
205	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	30		Honda	NEW VERZA (HITAM) 150 CW	150 CC	-	MH1KC5215GK287735	KC52E1285128	BP 2495 A	M11519942	Pembelian	12/06/2017	19.210.000,00
206	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	12		Daihatsu	Terios 1.5 RA/T/Deluxe	1495 CC	-	MHKG8FB2JJK002728	2NRF674470	BP1336A	M-11515328	Hibah	15/05/2018	239.510.000,00
207	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	13		Daihatsu	Terios 1.5 RA/T	1495 CC	-	MHKG8FB2JJK001918	2NRF665312	BP1337A	M-11515329	Hibah	15/05/2018	230.510.000,00
208	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	31		Honda	VARIO 125 CBS NATUNA	125 CC	-	MH1JM4115KK520140	JM41E1519831	BP 3751 N	Q-00589103	Pembelian	29/11/2019	20.000.000,00
209	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	32		VARIO 125 CBS	-	-	-	MH1JM4114KK533235	JM41E1533142	BP 2578 L	P-01911445	Pembelian	29/11/2019	19.500.000,00
210	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	33		VARIO 125 CBS	-	-	-	MH1JM4116KK481638	JM41E1481111	BP 3851 K	P-01934862	Pembelian	29/11/2019	19.500.000,00
211	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	34		VARIO 125 CBS	-	-	-	MH1JM4112KK486822	JM41E1486422	BP 3852 K	P-01934864	Pembelian	29/11/2019	19.500.000,00
212	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	35		VARIO 125 CBS	-	-	-	MH1JM4112KK533210	JM41E1533123	BP 3164 A	P-01926538	Pembelian	29/11/2019	19.500.000,00
213	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	36		VARIO 125 CBS	-	-	-	MH1JM4116KK533236	JM41E1533144	BP 3165 A	P-01926539	Pembelian	29/11/2019	19.500.000,00
214	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	37		HONDA	VARIO 125 CBS	125 CC	-	MH1JM4111KK533239	JM41E1533146	BP 2106 S	Q-00589070	Pembelian	29/11/2019	20.000.000,00
215	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	38		Honda	VARIO 125 CBS	-	-	MH1JM4116KK508109	JM41E1507754	BP 3825 A	P01920707	Pembelian	28/11/2019	17.700.000,00
216	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	39		Honda	VARIO 125 CBS	-	-	MH1JM4114KK508111	JM41E1507751	BP 3826 A	P01920708	Pembelian	28/11/2019	17.700.000,00
217	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	40		HONDA	VARIO 125 CBS	125 cc	-	MH1JM4110KK508218	JM41E1507866	BP 3827 A	P-01920709	Pembelian	28/11/2019	17.700.000,00
218	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	41		HONDA	VARIO 125 CBS	125CC	-	MH1JM4110KK508218	JM41E1507866	BP 3828 A	P-01920710	Pembelian	28/11/2019	17.700.000,00
219	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	42		HONDA	VARIO 125 CBS	125CC	-	MH1JM4114KK534630	JM41E1533747	BP 3829 A	P-01920711	Pembelian	28/11/2019	17.700.000,00
220	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	43		HONDA	VARIO 125 CBS	125CC	-	MH1JM4114KK487292	JM41E1486844	BP 3830 A	P-01920712	Pembelian	28/11/2019	17.700.000,00
221	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	44		HONDA	VARIO 125 CBS	125CC	-	MH1JM4114KK506973	JM41E1506573	BP 3831 A	P-01920713	Pembelian	28/11/2019	17.700.000,00
222	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	45		HONDA	VARIO 125 CBS	125CC	-	MH1JM4111KK491123	JM41E1490650	BP 3832 A	P-01920714	Pembelian	28/11/2019	17.700.000,00
223	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	46		HONDA	VARIO 125 CBS	125CC	-	MH1JM4117KK491093	JM41E1490585	BP 3833 A	P- 01920715	Pembelian	28/11/2019	17.700.000,00
224	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.6.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	3		ISUZU	NHR 55 CO EZ-1	2772 cc	-	MHCNHR55EHJ074312	M074312	BP 8313 A	M11510282	Pembelian	28/12/2017	445.000.000,00
225	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	47		HONDA	VARIO 125 CBS	125CC	-	MH1JM4115KK506951	JM41E1506550	BP 3834 A	P-01920716	Pembelian	28/11/2019	17.700.000,00
226	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	48		HONDA	VARIO 125 CBS	125CC	-	MH1JM4114KK487292	JM41E1486844	BP 3835 A	P-01920717	Pembelian	28/11/2019	17.700.000,00
227	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	49		Honda	VARIO 125 CBS	125	-	MH1JM4110KK533250	JM41E1533158	BP 1976 A	P-01919618	Pembelian	29/11/2019	19.500.000,00
228	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	50		Honda	VARIO 125 CBS A1F02N36M1 A/T WARNA MERAH	-	-	MH1JM411XKK533241	JM41E1533148	BP 1978 A	P-01919617	Pembelian	29/11/2019	19.500.000,00
229	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	15		DAIHATSU	S402RV-ZMDFJJ MU	1495 CC	-	MHKV3CA3JKK021280	3SZDGT1417	BP 1244 A	N09134797	Hibah	31/07/2019	225.000.000,00
230	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	16		DAIHATSU	S402RV-ZMDFJJ MU	1495 CC	-	MHKV3CAJKK021367	3SZDGT4333	BP 1288 A	N09134584	Hibah	31/07/2019	225.000.000,00
231	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	51		HONDA GL PRO	160 D	160 CC	-	MH1KC1212AK254658	KC12E1252433	BP 3039 A	H-3658952D	Pembelian	29/11/2010	20.900.000,00
232	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	52		HONDA GL PRO	160 D	160 CC	-	MH1KC1219AK254673	KC12E1252692	BP 3041 A	H-3658953D	Pembelian	29/11/2010	20.900.000,00
233	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	53		HONDA GL PRO	160 D	160 CC	-	MH1KC1213AK260050	KC12E1257723	BP 3042 A	H-3658954D	Pembelian	29/11/2010	20.900.000,00
234	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	54		HONDA GL PRO	160 D	160 CC	-	MH1KC1213AK260064	KC12E1257873	BP 3043 A	H-03658955D	Pembelian	29/11/2010	20.900.000,00
235	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6		Toyota	Avanza New S	1500 cc	-	MHFM1CB4JAK010054	DBN9831	BP 1880 A	F-6329538D	Pembelian	29/11/2010	191.180.000,00
236	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7		Toyota	Avanza New S	1500 cc	-	MHFM1CB4JAK009989	DRN8223	BP 107 A	F-6329537D	Pembelian	29/11/2010	191.180.000,00
237	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	8		Toyota	Avanza New S	1500 cc	-	MHFM1CB4JAK010020	DBN8541	BP 108 A	F-6329536D	Pembelian	29/11/2010	191.180.000,00
238	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	9		Toyota	Avanza New S	1500 cc	-	MHFM1CB4JAK010023	DBN8635	BP 109 A	F-6329535D	Pembelian	29/11/2010	191.180.000,00
239	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	10		Nissan	X TRAIL 2.52 WDCVTXT A/T	2500 cc	-	MHBF2CF1AAJ005263	QR25-933462A	BP 1200 A	H-1749566D	Pembelian	29/11/2010	312.400.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
240	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	17		TOYOTA	RUSH - 1.5 S A/T ALL NEW	1500	-	MHKE8FB3JLK040664	2NRF995218	BP 1906 A	P-01950825	Pembelian	14/04/2020	232.000.000,00
241	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	11		TOYOTA	GRAND NEW 2.4 VRZ A/T 4X4 DIESEL, WARNA : BLACK MI	2400	-	MHFHB3FS1L0036411	2GD. C652450	BP 1907 A	P-01950826	Pembelian	21/04/2020	511.000.000,00
242	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	7		HONDA	Accord 2.4	2400	-	MRHCMB6405P010149	K24A43803238	BP 1165 A	N-9542558	Pembelian	05/01/2005	368.686.800,00
243	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	24		Toyota	Kijang Innova G A/T	2000	-	MHFXW42G852052302	1TR-6174691	BP 34 A	D-7779816	Pembelian	11/01/2005	191.752.000,00
244	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	19		Toyota	Avanza	1500 cc	-	MHFXW42G852052351	DB61895	BP 1014 A	E1503892	Pembelian	08/02/2006	135.286.800,00
245	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	20		Toyota	Avanza	1495 cc	-	MHFM1CB4J8K004901	DBB9039	BP 1014 A	F-3129166	Pembelian	05/09/2008	171.600.000,00
246	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	5		Toyota	Inova	1998	-	MHFXW42G852052341	1TR-6447454	BP 1796 A	E-7523332	Pembelian	25/04/2007	211.070.200,00
247	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	8		Toyota	Inova	1998	-	MHFXW42G372103186	1TR-6460172	BP 99 A	E 7523336	Pembelian	25/04/2007	211.070.200,00
248	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	25		Toyota	Inova	2000	-	MHFXW42G052057975	1TR-6199717	BP 1765 A	D-7779829	Pembelian	09/02/2005	225.900.000,00
249	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	6		Toyota	Camry 2.5 V A/T	2500	-	MR053AK50D4502179	2AR-0810858	BP 1547 A	K-06976334	Pembelian	11/03/2014	594.550.000,00
250	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	11		Suzuki	New ertiga Dreza GS AT	1373 cc	-	MHYKZE81SHJ310968	K14BT1242875	BP 1498 A	M11504295	Pembelian	29/12/2017	237.400.000,00
251	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	12		Suzuki	New ertiga Dreza GS AT	1373 cc	-	MHYKZE81SHJ311031	K14BT1242944	BP 1491 A	M11504294	Pembelian	29/12/2017	237.400.000,00
252	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	14		Toyota	Innova Venturer 2.0 A/T Bens	1998 cc	-	MHFAW8EM1H0205985	1TRA278433	BP 188	M11506664	Pembelian	29/12/2017	395.000.000,00
253	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	15		Toyota	Innova Venturer 2.0 A/T Bens	1998 cc	-	MHFAW8EM7H0208969	1TRA409320	BP 1798 A	M-11518512	Pembelian	21/03/2018	395.300.000,00
254	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	16		SUZUKI	ALL NEW ERTIGA GX A/T	1495	-	MHYANC22SSJJ119820	K15BT1021309	BP 1760 A	N09128374	Pembelian	03/12/2018	246.623.870,00
255	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	6		Suzuki	All New Ertiga GX AT 2018	1462 cc	-	MHYANC22SJJ119632	K15BT1021647	BP 1824 A	N09130906	Pembelian	15/03/2019	246.623.870,00
256	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	18		Suzuki	All New Ertiga GX AT 2018	1462 cc	-	MHYANC22SJJ100722	K15BT1000912	BP 1842 A	N09137024	Pembelian	15/03/2019	246.623.870,00
257	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	96		Honda	PCX 160 CBS (Merah)	160 cc	-	MH1KF7115NK419460	KF71E1419589	BP 2837 A	S-00455125	Pembelian	12/12/2022	31.524.000,00
258	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	97		Honda	PCX ABS (Putih)	160 CC	-	MH1KF8115NK158109	KF81E1158719	BP 2839 A	S-00455124	Pembelian	12/12/2022	34.810.000,00
259	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	6		Toyota	Hilux Double Cabin 2.4 G (4x4)	2400 CC	-	MR0KB8CD8P1140853	2GD 1339031	BP 8532 A	S-00454812	Pembelian	20/02/2023	453.100.000,00
260	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.1.5	Sport Utility Vehicle (SUV)	1		Honda	CRV 1.5. Turbo	1500 CC	-	MHRRW1840PJ350113	L15BJ1204364	BP 1146 A	S-04166422	Pembelian	04/04/2023	569.000.000,00
261	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.1.5	Sport Utility Vehicle (SUV)	2		Honda	CRV 1.5. Turbo	1500 CC	-	MHRRW1840PJ350096	L15BJ1204342	BP 1148 A	S-04166423	Pembelian	04/04/2023	569.000.000,00
262	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	4		TOYOTA	VIOS -1.5 E AT NEW(FTZ)	1500 cc	-	MR2BT9F38D1026666	1NZY847448	BP 1012 A	E2824036/K06992534	Pembelian	31/12/2013	217.600.000,00
263	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	8		SUZUKI ERTIGA	AVI414FTYPE2SDXAT	1373 CC	-	MHYKZE81SFJ253082	K14BT1156547	BP 1481A	L07290996	Pembelian	25/05/2015	232.771.200,00
264	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	9		SUZUKI ERTIGA	AVI414FTYPE2SDXAT	1373 CC	-	MHYKZE81SFJ253001	K14BT1156534	BP 1482A	L07290995	Pembelian	25/05/2015	232.771.200,00
265	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	10		SUZUKI ERTIGA	AVI414FTYPE2SDXAT	1373 CC	-	MHYKZE81SFJ252200	K14BT1155813	BP 1480A	L07290997	Pembelian	25/05/2015	232.771.200,00
266	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7		TOYOTA	TOYOTA Hi Ace commuter Manual	2494 CC	-	JTFSS22PXD0126243	2KDA124101	BP 7109 A	K-02754903	Pembelian	13/10/2013	397.750.000,00
267	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	8		Honda	New CRV	2354 cc	-	MHRRM1830CJ301415	R20A53402000	BP 1672 A	J-04993714	Pembelian	13/10/2012	367.140.000,00
268	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	9		Suzuki	Ertiga GL A/T	1373 CC	-	MHYKZE81SDJ230202	K14BT1090393	BP 1409 A	K06975747	Pembelian	14/10/2014	177.630.000,00
269	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	10		Suzuki	Ertiga GL A/T	1373 CC	-	MHYKZE81SDJ231936	K14BT1092423	BP 1410 A	K14B71092423	Pembelian	14/10/2014	177.630.000,00
270	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	11		Suzuki	Ertiga GL A/T	1373 CC	-	MHYKZE81SDJ239005	K14BT1101712	BP 1420 A	K-06975749	Pembelian	14/10/2014	177.630.000,00
271	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	16		Toyota	Kijang Innova G A/T	2000 cc	-	MHFXW42G052016830	1TR-6097126	BP 80 A	2645972	Pembelian	31/12/2004	225.900.000,00
272	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	17		Toyota	Kijang Innova G A/T	2000CC	-	MHFXW426152011961	1TR-6023480	BP 78 A	2645990	Pembelian	31/12/2004	225.900.000,00
273	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	18		Nissan	Grand Livina	1498 CC	-	MHBG1CG14BJ019996	HR15-9285674	BP 1062 A	N-09105918	Pembelian	31/12/2008	199.100.000,00
274	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	19		TOYOTA	AVANZA TYPE S-AT	1495 CC	-	MHFM1CB4JAK013079	DBW1118	BP 1205 A	H-04649385	Pembelian	31/12/2010	194.000.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
275	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	20		HONDA	CR-V RM 3 (Merah Maroon)	2354 CC	-	MHRRM3850DJ303292	K24Z99412516	BP 1433 A	K-00548865	Pembelian	31/12/2013	449.460.000,00
276	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	21		TOYOTA	AVANZA VELOS 1,5 A/T	1495 CC	-	MHKM1CB4JDK019230	DDN4724	BP 1379 A	K-02520845	Pembelian	31/12/2013	186.450.000,00
277	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	22		Suzuki / AV1414F	ERTIGA RAC DX-AT	1373 CC	-	MHYKZE81SDJ225498	K14BT1084022	BP 1437 A	K-00549190	Pembelian	31/12/2013	188.630.000,00
278	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	1		MITSUBISHI	STRADA TRITON	2477 CC	-	MMBJNKB409DO33528	4D56UCBL8766	BP 8015 A	8197175	Pembelian	05/10/2009	342.980.000,00
279	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	4		SUZUKI APV	GC 415 V M/T	1493 CC	-	MHYGDN41VFJ400161	G15AID345658	BP 8039A	L07290998	Pembelian	25/05/2015	135.605.600,00
280	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	5		SUZUKI APV3	GC 415 T(4X2) MT	1493 CC	-	MHYGDN41TFJ405839	G15AID353897	BP 8045A	L10623981	Pembelian	25/06/2015	130.420.000,00
281	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		KAWASAKI	KLX	144 cc	-	MH4LX150CDKP68765	LX150CEPA6488	BP 6036 A	I11554895	Pembelian	22/02/2013	26.750.000,00
282	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		KAWASAKI	KLX	144 cc	-	MH4LX150CCKP63288	LX150CEP98958	BP 6037 A	I11554894	Pembelian	22/02/2013	26.750.000,00
283	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3		Honda Mega Pro	GL	150CC	-	MHIKC12139KI66388	KCI2E1165760	BP 3514 A	F-7635345	Pembelian	05/10/2009	22.000.000,00
284	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	4		Yamaha	Mio	113 cc	-	MH328D0089J956215	28D956551	BP 4025 A	F-7635307	Pembelian	05/10/2009	22.000.000,00
285	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	1		Toyota	-	-	-	-	-	BM 18 XP	-	Hibah	31/12/2006	95.600.000,00
286	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	2		Toyota	-	-	-	-	-	BM 17 XP	-	Hibah	31/12/2006	69.800.000,00
287	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	3		Toyota	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	75.000.000,00
288	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.1.2	Jeep	1		Nisan	Terano	2400	-	WND21.G64466	Z24.952353Y	BM 1483 AP	C-33753247	Hibah	31/12/2006	196.500.000,00
289	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.1.2	Jeep	2		Nisan	Terano	2400	-	WND21.G64217	Z24.944184Y	BM 1482 AP	C-3375326	Hibah	31/12/2006	267.500.000,00
290	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	3		Toyota	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	32.400.000,00
291	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	4		Toyota	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	32.400.000,00
292	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	5		Toyota	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	35.000.000,00
293	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	6		Mitsubishi	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	133.000.000,00
294	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	7		Mitsubishi	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	133.000.000,00
295	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4		Mitsubishi	FE114	3298	-	FE114-066255	A-1160757	BM 7154 AP	4D31C-323330	Hibah	31/12/2006	67.400.000,00
296	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	5		Mitsubishi	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	67.400.000,00
297	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6		Toyota	Kijang	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	29.000.000,00
298	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7		Toyota	Kijang	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	29.000.000,00
299	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.3.1	Truck + Attachment	1		Toyota	Dyna	-	-	MHF31BY4320055864	14B-1703787	BM 8771 AP	C-3609670	Hibah	31/12/2006	158.000.000,00
300	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	1		Isuzu	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	110.000.000,00
301	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	2		Isuzu	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	110.000.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
302	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.6.4	Mobil Pemadam Kebakaran	1		Isuzu	-	-	-	MHCNK66LY2J002519	WOO2519	BM 8785 AP	C-3868310	Hibah	31/12/2006	680.500.000,00
303	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.6.4	Mobil Pemadam Kebakaran	2		Isuzu	-	-	-	MHCNK66LY2J002731	WOO2731	BM 8786 AP	C-3868309	Hibah	31/12/2006	680.500.000,00
304	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.6.4	Mobil Pemadam Kebakaran	3		Mitsubishi	-	-	-	MHMFE349E2R043071	4D34-2X3074	BM 8826 AP	C-4399071	Hibah	31/12/2006	707.500.000,00
305	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		Suzuki	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	1.275.000,00
306	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		Suzuki	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	1.275.000,00
307	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3		Suzuki	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	1.275.000,00
308	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	4		Suzuki	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	1.275.000,00
309	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	5		Suzuki	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	1.275.000,00
310	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	6		Suzuki	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	1.275.000,00
311	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	7		Suzuki	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	1.275.000,00
312	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	8		Suzuki	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	1.275.000,00
313	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	9		Suzuki	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	1.275.000,00
314	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	10		Suzuki	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	1.275.000,00
315	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	11		Suzuki	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	1.275.000,00
316	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	12		Suzuki	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.990.000,00
317	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	13		Suzuki	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.990.000,00
318	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	14		Suzuki	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.990.000,00
319	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	15		Suzuki	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.990.000,00
320	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	16		Suzuki	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	1.275.000,00
321	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	17		Suzuki	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	1.275.000,00
322	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	18		Suzuki	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.990.000,00
323	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	19		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.450.000,00
324	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	20		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.450.000,00
325	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	21		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.450.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
326	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	22		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.450.000,00
327	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	23		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.300.000,00
328	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	24		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.300.000,00
329	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	25		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.300.000,00
330	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	26		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.450.000,00
331	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	27		Suzuki	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	3.995.000,00
332	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	28		Suzuki	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	3.995.000,00
333	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	29		Suzuki	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	3.995.000,00
334	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	30		Suzuki	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	3.995.000,00
335	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	31		Suzuki	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	3.995.000,00
336	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	32		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.450.000,00
337	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	33		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.450.000,00
338	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	34		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.450.000,00
339	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	35		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.450.000,00
340	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	36		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.450.000,00
341	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	37		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.450.000,00
342	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	38		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.450.000,00
343	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	39		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.450.000,00
344	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	40		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.450.000,00
345	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	41		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.450.000,00
346	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	42		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.450.000,00
347	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	43		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.450.000,00
348	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	44		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.450.000,00
349	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	45		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.450.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
350	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	46		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.450.000,00
351	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	47		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.450.000,00
352	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	48		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.450.000,00
353	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	49		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.450.000,00
354	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	50		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.450.000,00
355	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	51		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	6.500.000,00
356	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	52		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	6.500.000,00
357	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	53		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	6.500.000,00
358	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	54		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	6.500.000,00
359	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	55		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	6.500.000,00
360	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	56		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	6.500.000,00
361	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	57		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	6.500.000,00
362	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	58		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	6.500.000,00
363	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	59		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	6.500.000,00
364	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	60		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	6.500.000,00
365	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	61		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	6.500.000,00
366	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	62		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	6.500.000,00
367	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	63		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	6.500.000,00
368	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	64		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	6.500.000,00
369	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	65		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	6.500.000,00
370	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	66		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	6.500.000,00
371	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	67		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	6.500.000,00
372	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	68		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	6.500.000,00
373	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	69		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	6.500.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
374	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	70		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	6.500.000,00
375	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	71		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	6.500.000,00
376	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	72		Honda	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	1.319.000,00
377	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	73		Honda	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.088.230,00
378	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	74		Honda Tiger	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	27.800.000,00
379	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	75		Honda Win	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	10.000.000,00
380	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	76		Suzuki	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	11.000.000,00
381	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	77		Suzuki	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	11.000.000,00
382	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	78		Suzuki	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	11.000.000,00
383	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	79		Suzuki	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	11.000.000,00
384	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	80		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	8.000.000,00
385	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	81		Yamaha	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	11.000.000,00
386	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	82		Honda/GL	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	4.938.000,00
387	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	83		Honda/GL	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	4.938.000,00
388	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	84		Suzuku/X Super	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.990.000,00
389	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	85		Suzuku/X Super	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.990.000,00
390	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	86		Suzuku/X Super	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.990.000,00
391	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	87		Suzuku/X Super	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	2.990.000,00
392	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	88		Honda Cup	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	3.000.000,00
393	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	89		Honda	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	5.000.000,00
394	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	90		Honda CG	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	850.000,00
395	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Pejabat Penatausahaan Barang)	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	91		Honda CG	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2006	3.143.000,00
396	Inspektorat Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	1		Toyota	Avanza 1.3 S. A/T	1300	-	MHFXWA42G852052344	DB61968	BP 1013 A	E-2824037	Pembelian	08/02/2006	135.286.800,00
397	Inspektorat Daerah	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	1		Toyota	Innova	2000	-	MHFXW42G072103002	1TR-6458218	BP 96 A	E-7523333	Pembelian	25/04/2007	211.070.200,00
398	Inspektorat Daerah	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	2		Suzuki	ERTIGA GL AT	1373 cc	-	MHYKZE81SEJ218170	K14BT1121250	BP 1259 A	K-06975976	Pembelian	17/02/2014	186.870.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
399	Inspektorat Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7		Toyota	Avanza	1300 CC	-	MHFFMRHK35K001622	DB17344	BP 1396 A	D-7779825	Pembelian	01/02/2005	123.454.545,00
400	Inspektorat Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		TOYOTA	FORTUNER G A/T DIESEL VNT NEW	2400 CC	-	MHFZR69G9E3095524	2KD-U504681	BP 1263 A	K-06976279	Pembelian	06/06/2014	409.700.000,00
401	Inspektorat Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2		TOYOTA	INNOVA V A/T LUXURY NEW	2000 CC	-	MHFXW43G3E4087071	1TR-7810024	BP 1260 A	K-06976270	Pembelian	06/06/2014	313.950.000,00
402	Inspektorat Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3		Toyota	Avanza G.A/T 1300 CC	1300	-	MHFM1BB3JBK015836	DJ61633	BP 1381 A	I-04618886	Pembelian	06/10/2011	153.125.000,00
403	Inspektorat Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4		Toyota	Avanza G.A/T 1300 CC	1300	-	MHFM1BB3JBK016012	DJ68163	BP 1382 A	I-04618885	Pembelian	06/10/2011	153.125.000,00
404	Inspektorat Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	5		Mitshubis i	Strada Triton	2477 CC	-	MMBJNKB409D034966	4D56UCBL9961	BP 8016 A	F-8197174	Pembelian	08/10/2009	339.900.000,00
405	Inspektorat Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		Honda	Tiger Type 200 RA1	200 cc	-	MH1MC2315BK034526	MC23E1034418	BP 2713 A	106659517D	Pembelian	06/10/2011	23.859.000,00
406	Inspektorat Daerah	1.3.2.2.1.4.6	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1		HONDA	NF100SID	100 CC	-	MH1HB421XGK083584	HB42E1056930	BP 2547 A	311404	Hibah	30/06/2006	15.890.000,00
407	Inspektorat Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	8		Honda	CR-V Prestige Turbo AT	1498cc	-	MHRRW1880MJ102164	L15BJ1152449	BP 1028 AA	Q-08874687	Pembelian	16/07/2021	553.620.700,00
408	Inspektorat Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	9		Toyota	Innova Venturer AT Diesel	2393cc	-	MHFAB3EM1M0019811	2GDC834295	BP 1025 AA	Q-08874664	Pembelian	14/06/2021	480.300.000,00
409	Inspektorat Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	10		Toyota	Innova Venturer AT Diesel	2393cc	-	MHFAB3EM5M0019746	2GDC832914	BP 1026 AA	Q-08874665	Pembelian	14/06/2021	480.300.000,00
410	Inspektorat Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	11		Suzuki	Ertiga SS AT	1500cc	-	MHYANC22SMJ108148	K15BT1281714	BP 1031 AA	Q-024209	Pembelian	30/06/2021	264.000.000,00
411	Inspektorat Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	12		TOYOTA	AVANZA VELOZ AT	1496	-	MHKM5FB4JMK030532	2NRG609117	BP 1948 A	Q-08874533	Pembelian	05/05/2021	233.600.000,00
412	Inspektorat Daerah	1.3.2.2.1.1.5	Sport Utility Vehicle (SUV)	1		TOYOTA	RUSH 1.5 S AT GR	1496	-	MHKE8FB3JHK064631	2NR G776971	BP 1279 AA	R- 02855373	Pembelian	04/03/2022	290.000.000,00
413	Inspektorat Daerah	1.3.2.2.1.1.5	Sport Utility Vehicle (SUV)	2		TOYOTA	RUSH 1.5 S AT GR	1496	-	MHKE8FB3JNK064552	2NR G776521	BP 1278 AA	R- 02855374	Pembelian	04/03/2022	290.000.000,00
414	Inspektorat Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		Yamaha	All New NMAX 155 CONNECTED / Automatic	155	-	MH3SG5680NK127522	G3L8E0983973	BP 4527 A	R-02863735	Pembelian	24/02/2022	35.430.000,00
415	Inspektorat Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3		Yamaha	All New NMAX 155 CONNECTED / Automatic	155	-	MH3SG5680NK127115	G3L8E0978773	BP 4528 A	R-02863736	Pembelian	24/02/2022	35.430.000,00
416	Inspektorat Daerah	1.3.2.2.1.4.6	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	2		HONDA	NF100SID	100 CC	-	MH1HB421XGK083583	HB42E1056938	BP 2548 A	311404	Hibah	30/06/2006	15.890.000,00
417	Inspektorat Daerah	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6		TOYOTA	AVANZA	1500	-	MHFMIBA3J6K003796	DB60441	BP 1019 A	1014034	Hibah	30/06/2006	139.700.000,00
418	Inspektorat Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	4		Yamaha	All New NMAX 155 CONNECTED / Automatic	155	-	MH3565680NK127120	G3L8E0978750	BP 4529 A	R-02863737	Pembelian	24/02/2022	35.430.000,00
419	Inspektorat Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	5		Yamaha	All New NMAX 155 CONNECTED / Automatic	155	-	MH3SG5680NK127068	G3L8E0978712	BP 4520 A	R-02863738	Pembelian	24/02/2022	35.430.000,00
420	Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	3		Toyota / Kijang Innova zenix 2.0 V CVT	Kijang Innova	-	-	-	-	-	-	Pembelian	16/02/2023	446.800.000,00
421	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		KIJANG	INOVA	1998	-	MHFXW426642009413	1TR6020037	BM 16 HQ / BERUBAH MENJADI BP 1823 A	N-1788996	Pembelian	01/01/2004	225.900.000,00
422	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	16		SUZUKI	AVI414FDRZ 4x2 A/T	1400	-	MHYKZE81SHJ310907	K14BT1242758	BP 1627 A	M-10708525	Pembelian	15/06/2017	233.000.000,00
423	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	13		YAMAHA	BU 9	125 CC	-	MH3SE9040HJ010703	E3W9E0013004	BP 4218 A	M-10721898	Pembelian	05/10/2017	19.442.000,00
424	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	18		Toyota	AVANZA 1.3 G	1500	-	MHFM1BA3J6K004780	D861849	BP 1016 A	E-1503894	Pembelian	08/02/2006	135.286.800,00
425	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	20		TOYOTA	AVANZA VELOZ A/T	1500	-	MKHMICB4JCK007505	DCW7463	BP 1606 A	J-00056011	Pembelian	10/02/2012	179.000.000,00
426	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	19		TOYOTA	AVANZA 1.5 S	1500	-	MHFM1CB4J8K004917	DB89946	BP 1956 A	F-3129168	Pembelian	05/09/2008	171.600.000,00
427	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	22		SUZUKI	ARK415P GX A/T	1500	-	MHYANC22SJJ120800	K15BT1023893	BP 1840 A	N-09137021	Pembelian	29/03/2019	246.623.870,00
428	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	23		Toyota	Innova Venturer 2.0 A/T Bens	2000 CC	-	MHFAW8EM5H0205634	1TRA267523	BP 1647 A	M11506663	Pembelian	29/12/2017	395.000.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
429	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	17		Toyota	New Rush	1500 CC	-	MHKE8FB3JKJ002097	2NRF910977	BP 1860 A	P-01944006	Pembelian	13/11/2019	259.000.000,00
430	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	14		Honda	X1H02N35M1 A/T	150 CC	-	MH1KF4129LK087494	KF41E2089899	BP 3725 A	Q 00589636	Pembelian	04/12/2020	22.935.000,00
431	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	15		Honda	X1H02N35M1 A/T	150 CC	-	MH1KF4120LK058675	KF41E2062790	BP 3726 A	Q 00589635	Pembelian	04/12/2020	22.935.000,00
432	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	16		Honda	X1H02N35M1 A/T	150 CC	-	MH1KF4120LK053461	KF41E2057578	BP 3728 A	Q 00589634	Pembelian	04/12/2020	22.935.000,00
433	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	17		Honda	X1H02N35M1 A/T	150 CC	-	MH1KF4122LK102532	KF41E2106639	BP 3729 A	Q 00589633	Pembelian	04/12/2020	22.935.000,00
434	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	5		Toyota	Innova Luxury	1998 cc	-	MHFXW420B2195740	1TR-7148695	BP 1230 A	I-04194376	Pembelian	25/07/2011	248.000.000,00
435	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	7		Toyota	Innova G A/T	1998 cc	-	MHFXW426842006173	1TR-6012785	BP 200 A	D1788924	Pembelian	01/06/2004	225.900.000,00
436	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	8		Toyota	Innova Luxury	1998 cc	-	MHFXW43G9D4076199	1TR-7508774	BP 54 A	K-06967501	Pembelian	15/05/2013	296.250.000,00
437	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	9		Toyota	Innova Luxury	1998 cc	-	MHFXW42G852052346	1TR-6038125	BP 1308 A	K-02754907	Pembelian	15/05/2013	296.250.000,00
438	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	10		Toyota	Innova Luxury	1998 cc	-	MHFXW43G1D4078416	1TR-7560252	BP 1319 A	K-02754914	Pembelian	15/08/2013	296.250.000,00
439	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	11		Toyota	New Avanza Veloz 1,5 AT	1495 cc	-	MHKM1CB4JDK020665	DDR5360	BP 1305 A	K-02754904	Pembelian	15/05/2013	186.450.000,00
440	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	12		Toyota	New Avanza Veloz 1,5 A/T	1495 cc	-	MHKM1CB4JDK020707	DDR6283	BP 1306 A	K-02754905	Pembelian	15/05/2013	186.450.000,00
441	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	13		Toyota	New Avanza Veloz 1,5 A/T	1495 cc	-	MHKM1CB4JDK020491	DDR4417	BP 1307 A	K-02754906	Pembelian	15/05/2013	186.450.000,00
442	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	14		Toyota	New Avanza Veloz	1495 cc	-	MHKM1CB4JDK028330	DEC4258	BP 1421 A	K-00548799	Pembelian	16/09/2013	192.750.000,00
443	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	15		Toyota	Kijang Innova V AT	1998 cc	-	MHFXW43G2A4050670	1TR-6953035	BP 1179 A	H-00207958	Pembelian	21/04/2010	299.970.000,00
444	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	1		Toyota	Hilux	1998 CC	-	MR0AW12G6A0021053	1TR-6953035	BP 8019 A	H-00207957	Pembelian	21/04/2010	159.830.000,00
445	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		Honda	NF 100 SLD	100 CC	-	MH1HB42156K103688	HB42E-102717	BP 2359 A	E2824152D	Pembelian	01/06/2006	12.100.000,00
446	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		Honda	NF 100 SLD	100 CC	-	MH1HB42136K103902	HB42E-1101545	BP 2578 A	E2824151D	Pembelian	01/06/2006	12.100.000,00
447	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3		Honda	NF 100 TD	100 cc	-	MH1HB711X9K748912	HB71E-1737891	BP 2363 A	F42402463D	Pembelian	21/03/2009	13.000.000,00
448	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	4		Honda	GL 200 R	200 cc	-	MH1MC22199K029406	MC22E-1029568	BP 4016 A	F4240242	Pembelian	21/03/2009	28.087.000,00
449	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	24		TOYOTA	INNOVA VENTURER	1998 CC	-	MHFAW8EM3J0209560	1TRA437972	BP 1738 A	M11518547	Pembelian	13/04/2018	395.300.000,00
450	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	5		Honda	NF 100 SE	100 CC	-	MH1HB71119K768174	HB71E-1737757	BP 4015 A	F4240244	Pembelian	21/03/2009	13.000.000,00
451	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	6		Honda	GL 200 R	200 cc	-	MH1MC2214AK074175	MC22E-1073520	BP 2121 A	H00207455D	Pembelian	21/04/2010	25.290.000,00
452	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	7		Honda	NF 125 TR	125 cc	-	MH1JB9128AK188785	JB91E-2181624	BP 2123 A	HO-0207454	Pembelian	21/04/2010	16.890.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
453	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	8		Honda	NF 125 TR	125 cc	-	MH1JB9128AK188785	JB91E-2181987	BP 2124 A	HO-0207456	Pembelian	21/04/2010	16.890.000,00
454	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	9		Honda	GL 15A1RR M/T	150 cc	-	MH1KC311XBK146352	KC31E-1146164	BP 3103 A	I06650520D	Pembelian	09/11/2011	19.064.000,00
455	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	10		Honda	Vario NC12A1CF	125 cc	-	MH1JFB114DK919218	JFB1E-1875035	BP 2433 A	K-08096297	Pembelian	15/05/2013	15.435.000,00
456	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	11		Honda	GL 15A1RR M/T	150 cc	-	MH1KC3116DK282660	KC31E-1281421	BP 2432 A	K-08096296	Pembelian	15/05/2013	19.513.000,00
457	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	12		Honda	NF 100 TD	100 cc	-	MH1HB62198K347715	HB62E-1344293	BP 2034 A	F1779961D	Pembelian	25/03/2008	12.877.000,00
458	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		Yamaha	XEON GT	125 CC	-	M132SV001EK017765	25V017952	BP 5118 A	L-03534504	Pembelian	05/03/2014	19.999.980,00
459	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		Kawasaki KLX 150C	Motor Trail	-	-	MH4LX150CDKP77227	LX150CEPB8569	B 6360 PV	K-04008769	Hibah	23/12/2013	26.873.796,00
460	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3		Kawasaki KLX 150C	Motor Trail	-	-	MH4LX150CDKP71066	LX150CEPB8267	B 6361 PV	K-04008769	Hibah	23/12/2013	26.873.796,00
461	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.3.2.2.1.6.6	Mobil Tangki Air	1		Isuzu NKR 71 HD	Tanki Air	4571cc	-	MHCNKR71HDJ049777	B049777	B 9211 PMA	N-09119390	Hibah	23/12/2013	329.888.750,00
462	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.3.2.2.1.6.5	Mobil Tinja	1		ISUZU NKR 71 E2-2	Mobil Toilet Umum	4570cc	-	MHCNK71LYCJ040345	B040345	B 9724 PQU	N-09137306	Hibah	13/02/2013	741.070.000,00
463	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.3.2.2.1.6.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	1		Isuzu NKR 71 HD E2	-	-	4C491862ZZ2BW	MHCNK71LYAJ018956	4C491862ZZ2BW	B 9064 PQV	H-04815577	Hibah	27/12/2010	409.500.000,00
464	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.3.2.2.1.3.7	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1		Mitsubishi PE74HDV 4 X2	Mobil Dapur Lapangan	03908 CC	-	MHMFE74P5AK036057	4C491862ZZ2BW	B 9050 PQ	H-04815706	Hibah	27/12/2010	448.403.882,00
465	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	1		Mitsubishi STR CR2.5 A DC GLS MT	Mobil Rescue		MMJNKB40AD049711	MMJNKB40AD049711	4D56UCCC4040	B 9200 PS	N-09088550	Hibah	27/12/2010	403.450.000,00
466	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	4		Kawasaki LX 150 S	Motor Trail	150 CC	MH4LX150CAKP19603	MH4LX150CAKP19603	LX150CEP28659	B 6825 PN	H-08548352	Hibah	27/12/2010	25.000.000,00
467	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	5		Kawasaki LX 150 S	Motor Trail	150 CC	MH4LX150CAKP19577	MH4LX150CAKP19577	LX150CEP28925	B 6826 PN	H-08548353	Hibah	27/12/2010	25.000.000,00
468	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	2		Mitsubishi STR GLS Double Cabin	Mobil Rescue Commando	-	-	MMBJNKB40CD014331	4D56UCDA3194	B 9427 PSC	N-09088548	Hibah	19/12/2011	396.990.000,00
469	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.3.2.2.1.3.1	Truck + Attachment	1		Isuzu Elf NKR 71 HD	Truck Serba Guna	-	-	MHCNK71LYBJ027550	B027550	B 9336 PQ	I-04801652	Hibah	26/12/2011	420.387.000,00
470	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.3.2.2.1.6.1	Mobil Ambulance	1		Isuzu NKR 55	NKR 55	-	-	MHCNKR55EYBJ040418	M040418	BP 7016 A	M040418	Hibah	26/12/2011	384.120.000,00
471	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	6		Kawasaki LX 150 S	Motor Trail	150 cc	-	MH4LX150CFJP28264	LX150CEPM6170	B 6646 TQC	M-01894627	Hibah	28/12/2015	28.061.000,00
472	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	7		Kawasaki LX 150 S	Motor Trail	150 cc	-	MH4LX150CFJP282092	LX150CEPM5659	B 6647 TQC	M-01896966	Hibah	28/12/2015	28.061.000,00
473	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	1		Mitsubishi L300	Mobil barang Pick Up Maxi	2477cc	-	MHML0PU39GK198815	4D5C-P60725	B 9288 TTA	N-09088543	Hibah	22/02/2016	178.232.700,00
474	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.3.2.2.1.6.6	Mobil Tangki Air	2		Isuzu NKR71 HD 6.1		4570cc	-	MHCNMR71HGJ076558	B 0765058	B 9101 TMA	N-09088539	Hibah	22/02/2016	363.055.000,00
475	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	3		SUZUKI	ERTIGA 1.5 ABS SDX	1462cc	-	MHYANC22SJJ114016	K15BT1014356	BP 1692 A	N-09121903	Pembelian	10/09/2018	246.623.870,00
476	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	2		Mitsubishi HDX-4WD	Starda Double Cabin	-	MMBJNKB70DD044172	4M4ORAD6862	MMBJNKB70DD044172	B 9157 PS	K-10586586	Hibah	31/12/2013	2.362.888.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
477	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	5		Toyota	All New Kijang Innova Venturer 2.4 Q A/T Diesel Vi	2400	-	MHFAB3EMXL0016775	2GDC721398	BP 1965 A	P-01949055	Pembelian	29/07/2020	450.000.000,00
478	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.3.2.2.1.4.6	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1		GESITS	Sepeda Motor Listrik Roda 2	125 cc	-	MK5111110NJ000103	MK511111M004211	B 5008 TW	-	Hibah	14/12/2022	33.022.593,00
479	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	4		Toyota	Kijang innova	1998cc	-	MHFXW42G852052317	1TR 6272680	BP 49 A	E0739561	Pembelian	21/03/2005	188.090.909,00
480	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3397		Honda	AFP12W21C08 M/T	125 cc	-	MH1JBM210GK022567	JBM2E1021616	BP 2784 A	M-10693424	Pembelian	29/12/2016	19.942.000,00
481	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3398		Honda	AFP12W21C08 M/T	125 cc	-	MH1JBM214GK022569	JBM2E10221611	BP 2791 A	M-10693355	Pembelian	29/12/2016	19.942.000,00
482	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3399		Honda	AFP12W21C08 M/T	125 cc	-	MH1JBM217GK011100	JBM2E1011109	BP 2758 A	M-10693300	Pembelian	29/12/2016	19.942.000,00
483	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3400		Honda	AFP12W21C08 M/T	125 cc	-	MH1JBM218GK011137	JBM2E1011207	BP 2790 A	M-10693354	Pembelian	29/12/2016	19.942.000,00
484	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3401		Honda	AFP12W21C08 M/T	125 cc	-	MH1JBM218GK022591	JBM2E1021655	BP 2792 A	M-10693356	Pembelian	29/12/2016	19.942.000,00
485	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3402		Honda	AFP12W21C08 M/T	125 cc	-	MH1JBM216GK022556	JBM2E1021632	BP 2793 A	M-10693357	Pembelian	29/12/2016	19.942.000,00
486	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3403		Honda	AFP12W21C08 M/T	125 cc	-	MH1JBM212GK022568	JBM2E1021618	BP 2796 A	M-10693373	Pembelian	29/12/2016	19.942.000,00
487	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3404		Honda	AFP12W21C08 M/T	125 cc	-	MH1JBM215GK010110	JBM2E1010013	BP 2797 A	M-10693374	Pembelian	29/12/2016	19.942.000,00
488	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3405		HONDA	A5C02R37M2M/T	150	-	MHK1KKCA21XKK056850	KCA2E1052474	BP 3749 A	Q-00581062	Pembelian	08/04/2020	26.900.000,00
489	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3		SUZUKI	GC4 15V APV DLX MT	1493 CC	-	MHYGDN42VAJ-339885	G15AID-207802	BP 1202 A	H-03664835	Hibah	18/12/2018	199.870.000,00
490	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2		Suzuku Ertiga	ARK415F GL (4X2) A/T	1462 CC	-	MHYGDN42VAJ-339885	K15BT1274298	BP 1029 AA	Q-02420909	Pembelian	21/06/2021	236.000.000,00
491	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3406		Honda	A1F02N37M1 A/T	125CC	-	MH1JM5118MK820716	JM51E1820289	BP 2980 A	Q-02420569	Pembelian	18/06/2021	21.864.000,00
492	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3407		Honda	A1F02N37M1 A/T	125CC	-	MH1JM5112MK840735	JM51E1840050	BP 2987 A	Q-02420568	Pembelian	18/06/2021	21.864.000,00
493	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3408		Honda	A1F02N37M1 A/T	125cc	-	MH1JM5112MK920357	JM51E1919624	BP 3762 A	R-02847556	Pembelian	19/11/2021	21.864.000,00
494	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4		Toyota Innova	Venturer 2.0 A/T	1998 cc	-	MHFAW3EM2N0003249	1TRA986503	BP 41 A	R-02864314	Pembelian	28/04/2022	466.500.000,00
495	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3409		HONDA	HONDA V1J02Q50L1/AT	157 cc	-	MH1KF8115NK126387	KF81E1126086	BP 2245 A	R-02882007	Pembelian	16/08/2022	31.679.000,00
496	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3410		HONDA	HONDA X1H02N32L1/AT	157 cc	-	MH1KF019NK1361227	KF01E1136330	BP 2246 A	R-02882008	Pembelian	16/08/2022	23.417.000,00
497	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3411		HONDA	HONDA X1H02N32L1/AT	157 cc	-	MH1KF0118NK136221	KF01E1136309	BP 2247 A	R-02882009	Pembelian	16/08/2022	23.417.000,00
498	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3412		HONDA	HONDA X1H02N32L1/AT	157 cc	-	MH1KF0116NK136220	KF01E1136310	BP 2248 A	R-02882010	Pembelian	16/08/2022	23.417.000,00
499	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	1		Toyota	Avanza	1498 CC	-	MHFM1CA4J9K019892	DBD6475	BP 1301 A	F -3133309	Pembelian	31/12/2009	166.000.000,00
500	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	2		KIJANG INOVA	Mini Bus	1998 cc	-	MHFXW42G6C2238155	1TR7409300	BP 1619 A	J-04373685	Pembelian	31/12/2012	235.950.000,00
501	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	3		Toyota / Avanza Veloz	Mini Bus	1495 cc	-	MHKM1CB4JDK021891	DDT2949	BP 1387 A	K-02522105	Pembelian	31/12/2013	186.450.000,00
502	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	4		Toyota /Avanza Veloz	Mini Bus	1495 CC	-	MHKM1CB4JDK022141	DDT2949	BP 1386 A	K-02522107	Pembelian	31/12/2013	186.450.000,00
503	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	6		Toyota/New Avanza	Mini Bus	1298 CC	-	MHKM1BA2JEK048132	MD26011	BP 1472 A	K-06976271	Pembelian	31/12/2014	160.150.000,00
504	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	7		Toyota	Kijang Inova	2000 CC	-	MHFXW42635204668	ITR6023796	BP 1814 A BERUBAH MENJADI BP 25 A	D-2645977	Pembelian	31/12/2004	225.900.000,00
505	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	1		Toyota/Hilux	Pik Up	1998 cc	-	MR0AW12G8C0034745	1TR7430228	BP 8107 A	J-04373683	Pembelian	31/12/2012	160.450.000,00
506	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.6.19	Mobil Unit Kesehatan Hewan	1		Toyota/New Avanza	Mini Bus	1298 CC	-	MHKM1BB2JDK003369	MB47450	BP 1358 A	K-02755043	Pembelian	31/12/2013	199.914.000,00
507	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		Honda	NF 125TD	125 CC	-	MH1JB91117K027730	JB91E1027758	BP 3051 A	E No 8031880	Pembelian	31/12/2007	14.137.000,00
508	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		Honda	NF 125TD	125 CC	-	MH1JB91147K037698	JB91E1036525	BP 3052 A	E No 8031881	Pembelian	31/12/2007	14.137.000,00
509	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3		Honda	NF125TR	125 CC	-	MHIJBO1154K140213	JBOIE.1138793	BP 2125 A	H-00885868	Pembelian	31/12/2010	16.053.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
510	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	4		HONDA	NF11B2d1M/T	110 CC	-	MH1JBE910BK116767	JBE3E1116947	BP 2314 A	I-06650402	Pembelian	31/12/2011	14.300.000,00
511	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	5		HONDA	NF11B2d1M/T	110 CC	-	MH1JBE319BK123796	JBE3E1122702	BP 2115 A BERUBAH MENJADI BP 2315 A	I-06650401	Pembelian	31/12/2011	14.300.000,00
512	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	6		Honda	Gl 200R	200 cc	-	MH1MC2317DK065859	MC23E1065206	BP 2155 A	K-09078183	Pembelian	31/12/2013	24.924.000,00
513	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	7		Honda	Gl 200R	200 cc	-	MH1MC2311DK068613	MC23E1067953	BP 2154 A	K-09078182	Pembelian	31/12/2013	24.924.000,00
514	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	8		Honda	NF125 TD	125 CC	-	MH1JBB115BK685313	JBB1E-1681415	BP2185A	H-08391768	Pembelian	31/12/2013	19.470.000,00
515	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	9		Honda	CB 15 A1RR M/T	150 CC	-	MH1KC4119EK311799	KC41E1310483	BP 2240 A	L-10616374	Pembelian	05/12/2014	23.285.000,00
516	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3413		HONDA	HONDA X1H02N32L1/AT	157 cc	-	MH1KF0117NK130992	KF01E1131069	BP 2249 A	R-02882011	Pembelian	16/08/2022	23.417.000,00
517	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3414		HONDA	HONDA X1H02N32L1/AT	157 cc	-	MH1KF0115NK130988	KF01E1131072	BP 2267 A	R-02882012	Pembelian	16/08/2022	23.417.000,00
518	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3415		HONDA	HONDA X1H02N32L1/AT	157 cc	-	MH1KF0110NK130932	KF01E1131010	BP 2268 A	R-02882013	Pembelian	16/08/2022	23.417.000,00
519	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3416		YAMAHA	All New N Max 155 Standart Version	155 cc	-	MH3SG5620PK784265	G3L8E1639533	BP 4729 A	S-04179750	Pembelian	23/05/2023	33.100.000,00
520	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.3.7	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1		Triseda 250 M/T	Kendaraan Roda 3	250 CC	-	MGDT25MKTPJ400050	LX170MM00508703	BP 6298 A	T- 03593800	Pembelian	11/08/2023	44.300.000,00
521	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3417		Yamaha	All New Aerox 155 Connected	155 cc	-	MH3SG6410PJ286130	G3P4E0205055	BP 5340 A	U- 05827893	Pembelian	16/10/2023	30.632.000,00
522	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3418		KAWASAKI	KLX 150 SM SE	150 CC	-	MH4LX150MPJP00110	LX150KEP00260	BP 6379 A	T- 03593698	Pembelian	11/10/2023	47.100.000,00
523	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	3		Toyota Toyota Inova	Innova	1998 CC	-	MHFXW426472098371	1TR-6416895	BP 63 A	7523321	Pembelian	25/04/2007	211.070.200,00
524	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	4		ISUZU	TBR 54 TURBO	2500	-	MHCTBR54FFK174030	E174030	BP 8047 A	L- 07296181	Pembelian	22/09/2015	248.600.000,00
525	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	1		Toyota	Avanza	1298 CC	-	MHFMIBA3JAK241184	DF80432	BP 1178 A	1947958	Pembelian	14/06/2010	170.500.000,00
526	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	2		Toyota	Avanza	1298 CC	-	MHFMIBA3JAK241918	DF78399	BP 1181 A	1947957	Pembelian	14/06/2010	170.500.000,00
527	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3		Honda	Mega Pro GL 15A1 RR M/T	150	-	MHIKC3113CK238274	KC31E1238141	BP 3251 A	J-05573043	Pembelian	12/07/2012	18.813.000,00
528	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		KAISAR KS 150	KAISAR KS 150	149	-	MKFS15MK57J01270	162FMJ71099403	BP 6008 A	G 3880607	Pembelian	01/12/2010	20.845.000,00
529	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		KAISAR KS 150	KAISAR KS 150	149	-	MKFS15MK57J030603	162FMJ71203088	BP 6009 A	G 3880608	Pembelian	01/12/2010	20.845.000,00
530	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	20		Kawasaki	LX	150 cc	-	MH4LX150CDKP86941	LX150CEPD1406	BP 6009 N	K-09087047	Hibah	13/11/2013	29.109.999,00
531	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	21		Kawasaki	LX	150 cc	-	MH4LX150CDKP85453	LX150CEPC8312	BP 6007 N	K-09087045	Hibah	13/11/2013	29.109.999,00
532	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	22		Kawasaki	LX	150 cc	-	MH4LX150CDKP88104	LX150CEPD3877	BP 6004 N	K-09087043	Hibah	13/11/2013	29.109.999,00
533	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	23		Kawasaki	AX	125 cc	-	MH4LX150CDKP85084	LX150CEPC8576	BP 6010 N	K-09087048	Hibah	13/11/2013	29.109.999,00
534	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	24		Honda	Blade PGM-F1	124,89 cc	-	MH1BM116EK028257	JBM1E1030083	BP 3620 N	K-12488162	Hibah	13/11/2014	16.470.000,00
535	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	25		Honda	Blade PGM-F1	124,89 cc	-	MH1BM116EK028277	JBM1E1030361	BP 3621 N	K-12488164	Hibah	13/11/2014	16.470.000,00
536	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	26		Yamaha	Scorpio Z LE	220	-	MH354D005EK053680	54D053729	BP 4090 S	L-10623268	Hibah	13/11/2014	27.020.375,00
537	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	27		Yamaha	Jupiter MX	150	-	MH355S005EK151639	55S151801	BP 4083 S	L-10623261	Hibah	13/11/2014	18.331.100,00
538	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	28		Kawasaki	KLX 150	150 cc	-	MH4LX150CBKP36238	LX150CEP55933	BP 6099 S	I-04197853	Hibah	16/11/2011	34.028.500,00
539	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	29		Kawasaki	KLX 150	150 cc	-	MH4LX150CBKP34088	LX150CEP52592	BP 6081 S	I-04197848	Hibah	16/11/2011	34.028.500,00
540	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	30		Kawasaki	KLX 150	150 cc	-	MH4LX150CBKP36700	LX150CEP56773	BP 6109 S	I-04197867	Hibah	16/11/2011	34.028.500,00
541	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	31		Kawasaki	KLX 150	150 cc	-	MH4LX150CBKP36535	LX150CEP56752	BP 6094 S	I-04197850	Hibah	16/11/2011	34.028.500,00
542	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	32		Kawasaki	KLX 150	150 cc	-	MH4LX150CBKP36571	LX150CEP56399	BP 6092 S	I-04197866	Hibah	16/11/2011	34.028.500,00
543	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	33		Kawasaki	KLX 150	150 cc	-	LX150CEP55391	-	-	-	Hibah	16/11/2011	34.028.500,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
544	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	41		HONDA	CRF 150L-VIN	150	-	MH1KD1119JK048333	KD11E-1047830	BM 2454 A	P-03840551	Hibah	31/07/2018	31.700.320,00
545	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	42		HONDA	CRF150L-VIN	150	-	MH1KD1112JK047167	KD11E-1046754	BM 2445 A	P-03840552	Hibah	31/07/2018	31.700.320,00
546	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	43		HONDA	CRF150L-VIN	150	-	MH1KD1113JK047162	KD11E-1046749	BM 2442 A	P-03840553	Hibah	31/07/2018	31.700.320,00
547	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	44		HONDA	CRF150L-VIN	150	-	MH1KD1115JK048328	KD11E-1047826	BM 2441 A	P-03840554	Hibah	31/07/2018	31.700.320,00
548	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	45		Honda	CRF 150L	150cc	-	MH1KD111XKK060073	KD11E1059378	BP 3160 A	P01873788	Pembelian	02/04/2019	31.207.820,00
549	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	46		Honda	CRF 150L	150cc	-	NH1KD1119KK055204	KD11E1054506	BP 3163 A	P01873790	Pembelian	02/04/2019	31.207.820,00
550	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	47		Honda	CRF 150L	150cc	-	MH1KD111XKK060167	KD11E1059260	BP 3158 A	P-01873786	Pembelian	02/04/2019	31.207.820,00
551	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	48		Honda	CRF 150L	150cc	-	MH1KD111XKK059744	KD11E1059543	BP 3159 A	P01873787	Pembelian	02/04/2019	31.207.820,00
552	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	4		Honda	Vario A/T	125	-	MH1JFV113FK065696	JFV1E1065163	BP 2413 A	L-10616462	Pembelian	27/04/2015	17.617.000,00
553	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	49		Honda	CRF 150L	150cc	-	MH1KD111XKK054099	KD11E1053499	BP 3162 A	P-01873789	Pembelian	02/04/2019	31.207.820,00
554	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	5		Toyota Hillux	Double Cabin	2,5 4x4 MT New	-	MR0KS8CD9H1104154	2KDU948501	BP 8209 A	L-06140357	Hibah	30/12/2017	390.600.000,00
555	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	50		YAMAHA	X RIDE	125 CC	-	MH32BU005HJ319871	2BU-319879	BP 4729 T	-	Hibah	30/12/2017	17.279.000,00
556	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.1.2	Jeep	1		MITSUBISHI	STRADA TRITION/GLS	2477 CC	-	MMBJNKB 40DD003768	4D56UCDW5673	BP 8134 A	J-05797294	Hibah	27/12/2012	344.591.500,00
557	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	34		Honda	Mega Pro	160 CC	-	-	-	BP 2146 T	-	Hibah	27/12/2006	14.375.000,00
558	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	35		Yamaha	Scorpio	225 CC	-	-	-	BP 4013 B	-	Hibah	27/12/2007	16.474.000,00
559	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	5		Kawasaki	Trail	150 cc	-	MH4LX150CCKP61812	LX150CEP96675	BP 6023 A	J-04373736	Hibah	27/12/2012	28.534.000,00
560	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	6		Kawasaki	Trail	150 cc	-	MH4LX150CCKP61661	LX150CEP96204	BP 6024 A	J-04373738	Hibah	27/12/2012	28.534.000,00
561	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	7		Kawasaki	Trail	150 cc	-	MH4LX150CCKP61662	LX150CEP96209	BP 6025 A	J-04373737	Hibah	27/12/2012	28.534.000,00
562	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	8		KAWASAKI	KLX 150C / Motor Trail	150 cc	-	MHK4LX150CEJP16608	LX150CEPJ1831	BP 6050 K	L-06111826	Hibah	27/12/2012	35.000.000,00
563	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	9		KAWASAKI	KLX 150C / Motor Trail	150 cc	-	MH4LX150CEJP16611	LX150CEPJ1825	BP 6051 K	L-06111827	Hibah	27/12/2012	35.000.000,00
564	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	10		HONDA	GL15C21A07 M/T	150 CC	-	MH1KC6114EK028531	KC61E1028235	BP 2408 K	L-06126078	Hibah	27/12/2012	20.687.000,00
565	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	11		HONDA	GL15C21A07 M/T	150 CC	-	MH1KC6111EK028518	KC61E1028493	BP 2409 K	L-06126079	Hibah	27/12/2012	20.687.000,00
566	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	1		TOYOTA	HILUX 2 OL M/T	1998 cc	-	MR0AG1269C0034270	1TR7410072	BP 8046 C	J-04372563	Hibah	27/12/2012	146.850.000,00
567	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	12		Honda	CBR	150 cc	-	MH1KC4113DK048725	KC41E1046412	BP 3116 C	K-01293638	Hibah	30/12/2013	20.438.000,00
568	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	2		Toyota	HILUX 5 G Double cabin	2495 CC	-	MROKS8CD1H1104973	2KDU972432	BP 8146 A	M11509393	Hibah	18/12/2017	392.300.000,00
569	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	3		Toyota	HILUX 5 G Double cabin	2494 CC	-	MROKS8CD9H1036454	2KDU971588	BP 8147 A	M11509394	Hibah	18/12/2017	402.300.000,00
570	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	13		Kawasaki	KLX150G	150 CC	-	MH4LX150GHJP56555	LX150CEW64098	BM 2243 A	M11654728D	Hibah	18/12/2017	31.600.000,00
571	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	14		Kawasaki	KLX150G	150 CC	-	MH4LX150GHJP56127	LX150CEW62883	BM 2278 A	M11654713D	Hibah	18/12/2017	31.600.000,00
572	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	15		Kawasaki	KLX150G	150 CC	-	MH4LX150GHJP56316	LX150CEW63212	BM 2266 A	M11654703D	Hibah	18/12/2017	31.600.000,00
573	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	16		Kawasaki	KLX150G	150 CC	-	MH4LX150GHJP59384	LX150CEW71220	BM 2289 A	M11654718D	Hibah	18/12/2017	31.600.000,00
574	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	17		Kawasaki	KLX150G	150 CC	-	MH4LX150GHJP59357	LX150CEW70900	BM 2263 A	M11654740D	Hibah	18/12/2017	32.400.000,00
575	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	18		Kawasaki	KLX150G	150 CC	-	MH4LX150GHJP56317	LX150CEW63228	BM 2276 A	M11654712D	Hibah	18/12/2017	32.400.000,00
576	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	19		Kawasaki	KLX150G	150 CC	-	MH4LX150GHJP56338	LX150CEW63209	BM 2270 A	M11654707D	Hibah	18/12/2017	32.400.000,00
577	Dinas Pariwisata	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	1		Toyota	Kijang Innova G AT/2006	2500 cc	-	MHFXW42G862068594	1TR6268581	BP 61 A BERUBAH MENJADI BP 1953 A	N0739573	Pembelian	21/03/2005	188.090.909,00
578	Dinas Pariwisata	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		Nissan	Grand Livina XV A/T	1500 CC	-	MHBG1CG1ABJ059806	HR15-979681A	BP 1571 A	H-09672605	Pembelian	22/06/2011	245.300.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
579	Dinas Pariwisata	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		Honda Absolute Revo	NF IIBID M/T	110cc	-	MHIJBCI25BK266955	JBCIE-2276288	BP 2189 A	H-08393052	Pembelian	22/06/2011	16.500.000,00
580	Dinas Pariwisata	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		YAMAHA	BU9	125 CC	-	MH3SE9040HJ012137	E3W9E0014739	BP 4508 A	M 11526661	Pembelian	12/07/2017	19.442.000,00
581	Dinas Pariwisata	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3		YAMAHA	BU9	125 CC	-	MH3SE9040HJ012103	E3W9E0014708	BP 4507 A	M 11526729	Pembelian	12/07/2017	19.442.000,00
582	Dinas Pariwisata	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2		Suzuki	AV1414FTYPE2AT4X2	1500 CC	-	MHYKZE81SHJ307383	K14BT1237524	BP 1643 A	M11504327	Pembelian	29/12/2017	209.000.000,00
583	Dinas Pariwisata	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3		Suzuki	AV1414FDRZ4X2AT	1500 CC	-	MHYKZE81SHJ315975	K14BT1250006	BP 1645 A	M11504326	Pembelian	29/12/2017	237.400.000,00
584	Dinas Pariwisata	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	2		Toyota	Kijang Innova G AT/2006	2500 cc	-	MHFXW42GX62073697	1TR6300769	BP 91 A BERUBAH MENJADI BP 1866 A	EO 739584	Pembelian	21/03/2005	188.090.909,00
585	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	3		Toyota	Innova	1988	-	MHFXW42G562072375	1TR-6291823	BP 83 A	E0739576	Pembelian	21/03/2005	188.090.909,00
586	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	1		Toyota	Avanza	1500	-	MHFM1BA3J8K092031	DD02127	BP 1538 A	DD02127	Pembelian	22/10/2008	156.915.000,00
587	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		HONDA	SUPRA FIT X	100cc	-	MH1HB7108K440193	HB71E1436424	BP 2013 A	F - 1219844	Pembelian	23/10/2008	15.378.000,00
588	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		HONDA	SUPRA FIT X	100cc	-	MH1HB71178K446427	HB71E1440821	BP 3984 A	1219843	Pembelian	23/10/2008	15.378.000,00
589	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	2		Toyota	Rush New	1496cc	-	MHKE8FB2JJK003537	2NRF746641	BP 1740 A	N-09130549	Pembelian	27/11/2018	244.900.000,00
590	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		SUZUKI	ALL NEW ERTIGA 04 SS AT 2021	1500	-	MHYANC22SMJ100468	K15BT1234982	BP 1024 AA	Q-00874585	Pembelian	16/03/2021	264.000.000,00
591	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.3.2.2.1.6.89	Kendaraan/Mobil Pengawalan	1		Toyota	Innova Venturer	2.0 cc	-	MHFAW3EM8N0003045	1TR A 955359	BP 1287 AA	R-02855220	Pembelian	21/02/2022	458.100.000,00
592	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	4		MITSUBISHI XPANDER 1,5L, GLS-1,4X2	XPANDER 1,5L, GLS-1,4X2	1500 CC	-	MK2NCLMATNJ000986	4A91KBD3473	BP 1039 A	S-00469750	Pembelian	15/02/2023	271.500.000,00
593	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	5		MITSUBISHI XPANDER 1,5L, GLS-1,4X2	XPANDER 1,5L, GLS-1,4X2	1500 CC	-	MK2NCLMATNJ000991	4A91KBD4190	BP 1035 A	S-00469749	Pembelian	15/02/2023	271.500.000,00
594	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3		HONDA	VARIO 160 CBS-SP	160 CC	-	MH1KF0115PK580241	KF01E1579608	BP 2610 A	U- 05827650	Pembelian	01/12/2023	26.095.000,00
595	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	4		HONDA	VARIO 160 CBS-SP	160 CC	-	MH1KF0116PK580233	KF01E1579619	BP 2607 A	U- 05827651	Pembelian	01/12/2023	26.095.000,00
596	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	1		Toyota Toyota Inova	Innova	2000	-	MHFXW42G852052340	1TR-6456341	BP 1683 AA	E-752331	Pembelian	25/04/2007	211.070.200,00
597	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		TOYOTA INNOVA	G. A/T	1998 CC	-	MHFXW426352013212	ITR-6025723	BP 1335 A	D--2645984	Pembelian	08/12/2004	225.900.000,00
598	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2		TOYOTA INNOVA	G. A/T	1998 CC	-	MHFXW42G952013635	1TR-6025801	BP 21 A	D-2645985	Pembelian	08/12/2004	225.900.000,00
599	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1977		HONDA	NF 125 TR	125 CC	-	MHIJB91167K027433	JB91E1027490	BP 2756 A	E-8031889	Pembelian	17/12/2007	15.350.000,00
600	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1978		HONDA	Vario 150 - VIN 2019	150	-	MH1KF4122MK237883	KF41E2212496	BP 3405 A	Q-02412122	Pembelian	27/05/2021	23.085.000,00
601	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1979		HONDA	Vario 150 - VIN 2019	150	-	MH1KF4121MK237986	KF41E2241115	BP 3406 A	Q-02412122	Pembelian	27/05/2021	23.085.000,00
602	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	5		Toyota	Innova V AT	2000	-	MHFAW8EM2M0218416	1TRA910595	BP 1052 AA	Q-08868381	Pembelian	14/12/2021	368.100.000,00
603	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6		SUZUKI	ALL NEW ERTIGA SS HYBRID AT ARK415F HS (4X2) A/T	1500 CC	-	MHYANC32SPJ105357	K15BT1545495	BP 1170 A	T-03593637	Pembelian	13/11/2023	292.100.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
604	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7		SUZUKI	ALL NEW ERTIGA SS HYBRID AT ARK415F HS (4X2) A/T	1500 CC	-	MHYANC32SPJ105350	K15BT1544566	BP 1173 A	T-03593638	Pembelian	13/11/2023	292.100.000,00
605	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)			Toyota	Avanza	1300 CC	-	MHFM1BA3J9K146336	DD97595	BP 1036 A	F-4240385		2009	
606	Satuan Polisi Pamong Praja	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	1		Nissan	Grand Livina	1500 CC	-	MHBG1CG1A9J028402	HR15-940616A	BP 1078 A	N5532066	Pembelian	11/11/2009	207.900.000,00
607	Satuan Polisi Pamong Praja	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	1		Suzuki	Ertiga	1400	-	MHYKZE81SEJ217890	K14BT1120923	BP 1258 A	K-06975975	Pembelian	11/03/2014	185.430.000,00
608	Satuan Polisi Pamong Praja	1.3.2.2.1.1.2	Jeep	1		Nissan	Terano Spirit	2389 CC	-	WD21-M74293	Z24-976597Y	BP 1031 A	E 3683622 D	Pembelian	21/12/2006	291.551.000,00
609	Satuan Polisi Pamong Praja	1.3.2.2.1.3.1	Truck + Attachment	1		Isuzu	Elp 120 PS	3660 CC	-	MHCNK71LY6J-005563	B-005563	BP 8010 A	E 3115539 D	Pembelian	21/12/2006	242.253.000,00
610	Satuan Polisi Pamong Praja	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	1		MITSUBISHI	GLX L200 STRADA	2835 cc	-	MMBCNK5706F040089	4M40ZB0993	BP 8430 A	1779983	Pembelian	25/07/2008	271.500.000,00
611	Satuan Polisi Pamong Praja	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	2		MITSUBISHI	STADA TRITON DOUBLE CABIN	2477 CC	-	MMBJNK408D093540	4D56UCBF7435	BP 8007 A	32033	Pembelian	28/05/2009	381.095.000,00
612	Satuan Polisi Pamong Praja	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		Honda	Mega Pro / Sport	1600 CW	-	MH1KC11196K-040615	KC11E-1040781	BP 2566 A	E 3114979 D	Pembelian	21/12/2006	18.124.667,00
613	Satuan Polisi Pamong Praja	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		Honda	Mega Pro / Sport	1600 CW	-	MH1KC11196K-042011	KC11E-1041030	BP 2567 A	E 3114977 D	Pembelian	21/12/2006	18.124.667,00
614	Satuan Polisi Pamong Praja	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3		Honda	Mega Pro / Sport	1600 CW	-	MH1KC11186K-040216	KC11E-1040565	BP 2568 A	E 3114988 D	Pembelian	21/12/2006	18.124.667,00
615	Satuan Polisi Pamong Praja	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	4		Honda	Mega Pro / Sport	1600 CW	-	MH1KC11136K-042022	KC11E-1040574	BP 2569 A	E 3114978 D	Pembelian	21/12/2006	18.124.667,00
616	Satuan Polisi Pamong Praja	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	16		YAMAHA	Nmax 155 Abs	150 CC	-	-	-	-	-	Pembelian	27/03/2023	37.253.950,00
617	Satuan Polisi Pamong Praja	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	2		TOYOTA	Innova Zenix 2.0 V HV CVT MODELISTA	2000 CC	-	-	-	-	-	Pembelian	06/03/2023	508.800.000,00
618	Satuan Polisi Pamong Praja	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	17		HONDA	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	27/11/2023	33.680.000,00
619	Satuan Polisi Pamong Praja	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	18		HONDA	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	27/11/2023	33.680.000,00
620	Satuan Polisi Pamong Praja	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	3		SUZUKI	GRAND VITARAGT A/T	-	-	-	-	-	-	Pembelian	14/11/2023	366.000.000,00
621	Satuan Polisi Pamong Praja	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	5		Honda	Mega Pro / Sport	1600 CW	-	MH1KC11146K-042014	KC11E-1040567	BP2571A	E3114982D	Pembelian	21/12/2006	18.124.667,00
622	Satuan Polisi Pamong Praja	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	6		Honda	Mega Pro / Sport	1600 CW	-	MH1KC11136K-042019	KC11E-1042019	BP 2572 A	E3114983D	Pembelian	21/12/2006	18.124.667,00
623	Satuan Polisi Pamong Praja	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	7		Honda	Mega Pro / Sport	1600 CW	-	MH1KC11156K-042023	KC11E-1040532	BP 2573 A	E3114984D	Pembelian	21/12/2006	22.165.000,00
624	Satuan Polisi Pamong Praja	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	8		Honda	Mega Pro / Sport	1600 CW	-	MH1KC11176K-042010	KC11E-1041032	BP 2574 A	E3114985D	Pembelian	21/12/2006	22.165.000,00
625	Satuan Polisi Pamong Praja	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	9		Honda	Mega Pro / Sport	1600 CW	-	MH1KC11156K-042006	KC11E-1041033	BP 2575 A	E3114986D	Pembelian	21/12/2006	22.165.000,00
626	Satuan Polisi Pamong Praja	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	10		Honda	Mega Pro / Sport	1600 CW	-	MH1KC11186K-042002	KC11E-1041088	BP 2576 A	E3114987D	Pembelian	21/12/2006	22.165.000,00
627	Satuan Polisi Pamong Praja	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	11		Honda	MegaPro	160 CC	-	MH1KC311XBK112833	KC31E1112723	BP 4135 A	H-09675559	Pembelian	29/07/2011	23.760.000,00
628	Satuan Polisi Pamong Praja	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	12		Honda	MegaPro	160 CC	-	MH1KC3110BK112811	KC31E1112603	BP 4136 A	H-09675560	Pembelian	29/07/2011	23.760.000,00
629	Satuan Polisi Pamong Praja	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	13		Honda	MegaPro	160 CC	-	MH1KC3113BK095521	KC31E1095023	BP 4137 A/BP 2752 A	H-09675561	Pembelian	29/07/2011	23.760.000,00
630	Satuan Polisi Pamong Praja	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	14		KAWASAKI	EX 250L	250	-	MH4EX250LGJP00188	EX250LEAB8186	BP 6149 A	M-05211741	Pembelian	21/03/2016	89.650.000,00
631	Satuan Polisi Pamong Praja	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	15		KAWASAKI	EX 250L	250	-	MH4EX250LGJP00462	EX250LEAB8439	BP 6148 A	M-05211740	Pembelian	21/03/2016	89.650.000,00
632	Badan Kepegawaian Daerah Dan Korpri	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	1		Toyota	Innova G AT	2000 cc	-	NHFXW42G672103070	1TR-6458759	BP 1263 A/BP 97 A	7523334 D	Pembelian	25/04/2007	211.070.200,00
633	Badan Kepegawaian Daerah Dan Korpri	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3		Toyota	New Avanza Veloz 1.5 M/T	1495 cc	-	MHKM1CA4JDKO57162	DEA0399	BP 1422 A	K-00548800	Pembelian	29/11/2013	183.800.000,00
634	Badan Kepegawaian Daerah Dan Korpri	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4		Toyota	Avanza 1500S	1498 CC	-	MHFM1CA4JAK043500	DBV5127	BP 1195 A	H 04648672 D	Pembelian	01/12/2010	180.000.000,00
635	Badan Kepegawaian Daerah Dan Korpri	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	5		Toyota	Innova G	1998 CC	-	MHFXW42G342005870	1TR-6012199	BP 1626 A	D 1788930 D	Hibah	01/01/2004	225.900.000,00
636	Badan Kepegawaian Daerah Dan Korpri	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	4		Yamaha	31B J Z-CW	115 CC	-	MH331B206CJ069154	31B1069062	BP 4302 A	J-00056062	Pembelian	02/03/2012	15.700.000,00
637	Badan Kepegawaian Daerah Dan Korpri	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	5		Yamaha	Xeon	125 CC	-	MH344D003CK340845	44D341049	BP 4301 A	J 00056063	Pembelian	02/03/2012	16.550.000,00
638	Badan Kepegawaian Daerah Dan Korpri	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	6		Yamaha	31B J Z-CW	115 CC	-	MH331B206CJ029027	31B1028690	BP 4303 A	J 00056061	Pembelian	02/03/2012	15.700.000,00
639	Badan Kepegawaian Daerah Dan Korpri	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	7		Yamaha	Xeon	125 CC	-	MH344D002CK335699	44D335837	BP 4304 A	J 00056060	Pembelian	02/03/2012	16.550.000,00
640	Badan Kepegawaian Daerah Dan Korpri	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	1		TOYOTA	ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BENSIN VIN	1998	-	MHFGW8EM8H1014097	1TR-A302038	BP 57 A/BP 17 A	M-10715165	Pembelian	14/06/2017	345.000.000,00
641	Badan Kepegawaian Daerah Dan Korpri	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	8		Yamaha	Nmax 155	155	-	MH356580MK113045	G3L8E0843068	BP 4097 A	R-02855403	Pembelian	29/11/2021	34.830.000,00
642	Badan Kepegawaian Daerah Dan Korpri	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	9		Honda	Vario 150	150	-	MH1KF4125MK412952	KF41E2416967	BP 2973 A	R-02847949	Pembelian	01/12/2021	23.085.000,00
643	Badan Kepegawaian Daerah Dan Korpri	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	10		Honda	Vario 150	150	-	MH1KF412XMK412946	KF41E2416961	BP 2974 A	R-02847950	Pembelian	01/12/2021	23.085.000,00
644	Badan Kepegawaian Daerah Dan Korpri	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	4		Toyota Innova	Venturer 2.0 A/T Bensin	2000 CC	-	MHFAW3EM4M0002781	1TR A931913	BP 1073 AA	R-02847982	Pembelian	08/12/2021	420.100.000,00
645	Badan Kepegawaian Daerah Dan Korpri	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	5		Toyota Rush	1.5 S A/T GR Sport	1500 CC	-	MHKE8FB3JMK058244	2NR G717644	BP 1072 AA	R-02847981	Pembelian	08/12/2021	257.000.000,00
646	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	1		TOYOTA	INNOVA 2.0 G A/T	2000	-	MHFAWBEM560203428	1TRA118312	BP 1536 A	L-11192478	Pembelian	25/05/2016	379.150.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
647	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		Innova	Ventura	1998	-	MHFAW8EM4L0215029	1TRA738877	BP 1857 A	P-01944617	Pembelian	30/07/2020	413.100.000,00
648	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	2		TOYOTA	INNOVA VENTURER 2.0QA/T	2000 CC	-	MHFAW8EM1K0213446	1TRA648515	BP 13 A BERUBAH MENJADI BP 58 A	P-01944110	Pembelian	05/12/2019	413.000.000,00
649	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	3		Toyota	Innova Zenix 2.0 V CVT	1987 cc	-	MHFAAAAAXN0004440	M204NA13771	BP 223 A	S-00454811	Pembelian	21/02/2023	446.800.000,00
650	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		Honda	Vario 160 CBS	160 cc	-	MH1KF0117PK331584	KF01E1333289	BP 3094 A	S-04158084	Pembelian	13/03/2023	26.055.000,00
651	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	4		TOYOTA	Avanza Veloz New 1,5	1500 CC	-	MHKAB1BY5PK067611	2NR4B33256	BP 1169 A	T-03575863	Pembelian	06/09/2023	281.300.000,00
652	Badan Penghubung	1.3.2.2.1.2.5	kendaraan bermotor penumpang lainnya (dst)	1		SUZUKI	PUSLING VIP	-	-	-	-	-	-	Pembelian	02/03/2023	328.500.000,00
653	Badan Penghubung	1.3.2.2.1.1.2	Jeep	1		Toyota	Fortuner	2700 CC	-	MR0ZX696460009297	2TR-6284702	BP 1007 A	E10503897	Pembelian	25/01/2006	308.180.400,00
654	Badan Penghubung	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	1		ISUZU	Mini Bus 13 Seat	2700 CC	-	MHCNH55EY6J-017210	MO17210	BP 7500 A	N4602882	Pembelian	19/12/2006	295.583.948,00
655	Badan Penghubung	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	2		Toyota	Camry	3.5 Q A/T	-	MR 053KK40B9002345	2GR 0782257	BP 1224 A	H-08395044	Pembelian	18/08/2011	697.400.000,00
656	Badan Penghubung	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	4		Toyota	All New Kijang VENTURER 2.0 A/T Bensin VIN	2000 CC	-	MHFAW8EM4J0210006	ITRA464454	BP 1730 A	M-11518725	Pembelian	02/07/2018	395.300.000,00
657	Badan Penghubung	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	1		Toyota	New Camry 2.5 V A/T VIN 2018 (PPN+By Regist	2500 cc	-	MR053AK50J4510916	2AR2011033	BP 1721 A	N-09128151	Pembelian	14/11/2018	590.700.000,00
658	Badan Penghubung	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	4		Toyota	New Camry 2,5 V A/T	2500 cc	-	-	-	-	-	Pembelian	31/08/2022	673.000.000,00
659	Badan Penghubung	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	2		Toyota	Alphard S 2.4 A/T	2400 CC	-	ANH20-8186482	2AZ-H720514	B 2513 DQ	I-09418321	Pembelian	26/07/2011	980.100.000,00
660	Badan Penghubung	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	3		Toyota Camry	Camry	1.8 G A/T	-	MR053REE2B4300994	2ZRX095627	BP 1964 A	I04198062	Pembelian	18/08/2011	387.200.000,00
661	Badan Penghubung	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	7		YAMAHA	ALL NEW NMAX 155 C ABS	155 cc	-	-	-	-	-	Pembelian	06/09/2023	35.380.000,00
662	Badan Penghubung	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7		Toyota	Kijang Innova G A/T	1998	-	MHFXW42G052052372	1TR-6176378	BP 1022 A	N-9542559	Pembelian	16/07/2005	225.900.000,00
663	Badan Penghubung	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		Daihatsu	F600 RV-GMDFJJ	1300 CC	-	MHKV1AA2J7KO24421	DN65502	B 1026 DQ	9297060	Pembelian	16/07/2007	102.553.000,00
664	Badan Penghubung	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2		Daihatsu	F600 RV-GMDFJJ	1300 CC	-	MHKV1AA2J7KO24297	DN65351	B 1058 DQ	9297297	Pembelian	16/07/2007	102.553.000,00
665	Badan Penghubung	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3		Daihatsu	Daihatsu F700RGTS	1500	-	MHKG2CJIJ7K003232	DAF7477	B 1048 DQ	9297413	Pembelian	17/07/2007	135.850.000,00
666	Badan Penghubung	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4		Toyota	Camry 2.5	2500 cc	-	MR053AK50045Q2773	2ARU033356	B 1865 SQA	K-10733486	Pembelian	31/12/2013	520.496.500,00
667	Badan Penghubung	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	5		Toyota	New Avanza Veloz 1.5 A/T	1500	-	MHKM1CB4JEK029259	DEED253	B 1459 SQP	L-00146484	Pembelian	29/12/2014	185.030.000,00
668	Badan Penghubung	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6		Toyota	New Avanza Veloz 1.5 A/T	1500	-	MHKM1CB4JEK029377	DED6445	B 1460 SQP	L-00146488	Pembelian	29/12/2014	185.030.000,00
669	Badan Penghubung	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		Suzuki	Thumder	150 CC	-	MH8EN125A6J318908	F4051D319319	B 6182 SQA	1910243	Pembelian	16/07/2006	17.425.000,00
670	Badan Penghubung	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		Suzuki	Thumder	150 CC	-	MH8EN125A6J313226	F4051D312503	B 6172 SQA	1910242	Pembelian	16/07/2006	17.425.000,00
671	Badan Penghubung	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3		Honda	NF 100 SE	100 CC	-	MH1HB71137K147127	HB71E1144001	B 6881 SQM	8667719	Pembelian	16/07/2007	18.000.000,00
672	Badan Penghubung	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	4		Honda	GL 160 D	160 CC	-	MH1KC11167K119435	KC11E1121874	B 6370 SQA	8883407	Pembelian	16/07/2007	18.000.000,00
673	Badan Penghubung	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	5		Kawasaki	LX150C (KLX 1508)	150 CC	-	MH4LX150COKP93864	LX150CEPE3157	B 3692 SQB	K-09300459	Pembelian	31/07/2013	26.895.000,00
674	Badan Penghubung	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	6		Kawasaki	LX150C (KLX 1508)	150 CC	-	MH4LX150COKP93880	LX150CEPE0692	B 3691 SQB	k-09300493	Pembelian	31/07/2013	26.895.000,00
675	Badan Penghubung	1.3.2.2.1.1.2	Jeep	2		Chevrolet	Captiva 2.4 L Gasoline Automatice	2400 CC	-	KL1C426FEAH302711	Z24SED-093232	BP 1203 A	H-00886729	Pembelian	12/04/2010	345.914.805,00
676	Badan Penghubung	1.3.2.2.1.1.2	Jeep	3		Ford	Everest TDCi XLT LTD 4x2 AT	2000 CC	-	MNBUSAD10AW311312	WLAT1214409	BP 2 MS	H- 04648671	Pembelian	04/05/2010	403.954.880,00
677	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		Toyota	Kijang Innova G/AT	1998	-	MHFXW426142008900	1TR-6017587	BP 115 A	D1788995	Pembelian	01/01/2004	225.900.000,00
678	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	1		Suzuki	Ertiga GL AT NIK	1375	-	MHYKZE81SEJ212537	K14BT1115589	BP 1468 A	K-06975913	Pembelian	02/05/2014	185.430.000,00
679	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	1		Toyota	Avanza 1,5 S AT	1,498	-	MHFM1CB4J9K005559	DBE2167	BP 1302 A	4240376	Pembelian	17/06/2009	188.000.000,00
680	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.3.2.2.1.6.3	Mobil Unit Penerangan Darat	1		ISUZU	PANTER	2,499	-	MHCTBR54F7K287687	E287687	B 7426 QK	8477123G	Hibah	31/12/2010	235.440.473,00
681	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	2		Toyota	Kijang Innova G/AT	1998	-	MHFXW42G062070355	1TR-6279205	BP 1374 A	N0739572	Pembelian	21/03/2005	188.090.909,00
682	Dinas Perpustakaan Daerah Dan Kearsipan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	21		SUZUKI ALL NEW	GL A/T	1500	-	K15T1001312	MHYANC22SJJ101087	BP 1830 A	N-09137019	Pembelian	29/03/2019	246.623.870,00
683	Dinas Perpustakaan Daerah Dan Kearsipan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	1		Toyota	Kijang Innova G-AT	1998 cc	-	MHFXW42G362072861	1TR 6294610	BP 95 A	E-0739588	Pembelian	01/12/2006	236.500.000,00
684	Dinas Perpustakaan Daerah Dan Kearsipan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	2		Toyota	KIJANG INNOVA V	1998	-	MHFXW 43G7E4086487	1 TR 7791710	BP 1246 A	K - 06975957	Pembelian	01/12/2014	291.700.000,00
685	Dinas Perpustakaan Daerah Dan Kearsipan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		Honda	Supra x 125/Bebek	125 CC	-	MHIJB51176K448021	JB51E-1440206	BP 2580 A	E-2824153	Pembelian	01/12/2006	16.150.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
686	Dinas Perpustakaan Daerah Dan Kearsipan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		Honda	Supra x 125/Bebek	125 CC	-	MHIJB51186K875126	JB51E-1868514	BP 2579 A	E-2824154	Pembelian	01/12/2006	16.150.000,00
687	Dinas Perpustakaan Daerah Dan Kearsipan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	3		TOYOTA	NEW AVANZA VELOZ 1.5 A/T	1500	-	MHKM1CB4JFK041009	3SZDFH5017	BP 1359 A	L-03562938	Pembelian	02/12/2015	211.850.000,00
688	Dinas Perpustakaan Daerah Dan Kearsipan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	4		Toyota	AVANZA VELOZ 1.5 A/T	1500	-	MHKM1CB4JFK041082	3S2DFJ9432	BP 1360 A	L-03562939	Pembelian	02/12/2015	211.850.000,00
689	Dinas Perpustakaan Daerah Dan Kearsipan	1.3.2.2.1.3.7	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1		Kaisar	Triseda SP250	250	-	MGDT25MKTJJ400203	167MMH2154658	BP 6216 A	N-09105646	Pembelian	30/07/2018	31.935.000,00
690	Dinas Perpustakaan Daerah Dan Kearsipan	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	1		TOYOTA/ HILUX 2.0 L MT	DELIVERI VAN KB	1998 CC	-	MR0AW12GX70005561	1TR6420911	BP 1076 A	F-1412338	Hibah	16/05/2007	137.455.000,00
691	Dinas Perpustakaan Daerah Dan Kearsipan	1.3.2.2.1.6.8	Mobil Unit Perpustakaan Keliling	1		Toyota	Hilux	1998 CC	-	MR0CW8BB3N0046732	1TRB00569	B 9825 PTB	T- 02941073	Hibah	27/12/2022	380.886.500,00
692	Dinas Perpustakaan Daerah Dan Kearsipan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3		-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	01/12/2009	13.300.000,00
693	Dinas Perpustakaan Daerah Dan Kearsipan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	4		-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	01/12/2009	13.300.000,00
694	Dinas Perpustakaan Daerah Dan Kearsipan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	5		-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	01/12/2009	13.300.000,00
695	Dinas Perpustakaan Daerah Dan Kearsipan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	6		-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	01/12/2009	13.300.000,00
696	Dinas Perpustakaan Daerah Dan Kearsipan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	5		Toyota	Kijang Innova G	2000	-	MHFXVV42G262080644	1TR.6331487	BP 1029 A	E-2824548	Pembelian	21/03/2005	188.090.909,00
697	Biro Organisasi Dan Korpri	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	1		Toyota	Avanza G A/t	G AT 1.300 cc	-	MHFM1BB3JBKO12638	DH59706	BP 1218 A	H-08395039	Pembelian	21/09/2011	176.000.000,00
698	Biro Organisasi Dan Korpri	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	2		Toyota	Avanza G A/t	G AT 1.300 cc	-	MHFM1BB3JBKO13303	DH79242	BP 1223 A	H-08395042	Pembelian	21/09/2011	176.000.000,00
699	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	3		Toyota	Avanza	1500 CC	-	MHKM1BB3JDK013213	MB24726	BP 1310 A	K-02754912	Pembelian	07/05/2013	176.150.000,00
700	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		Supra Honda	NF 125 TD1	125	-	MH1JB81109K467015	JB81E1462404	BP 4022 A	Fn-7635344	Pembelian	17/06/2009	18.300.000,00
701	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	1		SUZUKI ERTIGA	GX AT VIN 2015	-	-	MHYKZE81S FJ252595	K14RT1156109	BP 1241 A	L-03563083	Pembelian	09/04/2015	213.500.000,00
702	Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	2		Toyota	Innova	1998	-	MHFXW43G5E4087217	1KR7813572	BP 1590 A	K 06998014	Pembelian	21/07/2014	304.950.000,00
703	Biro Administrasi Pimpinan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	2		Toyota Avanza	/ 1.3 S A/T	1300 CC	-	MHFM1BA3J6K-006376	DB64127	BP 1008 A	E- No2824032	Pembelian	08/02/2006	135.286.800,00
704	Biro Administrasi Pimpinan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	1		TOYOTA	AVANZA G AT	1.300 cc	-	MHFM1BB3JBKO13499	DH89269	BP 1213 A	H-08395034	Pembelian	21/09/2011	176.000.000,00
705	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	1.3.2.2.1.4.6	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	2		Honda	Revo CW F1 Green Black	110	-	MH1JBK31XEK042096	JBK3E1041764	BP 2242 A	L-10616376	Pembelian	24/10/2014	14.302.000,00
706	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	1.3.2.2.1.4.6	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1		Honda	Tiger Revolution Causier (black red)/GL 200 D	200	-	MH1MC11138K034675	MCIIE-1033236	BP 2061 A	F3129144	Pembelian	22/09/2008	19.963.700,00
707	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		Yamaha	GT 125	125	-	MH32SV00AFJ225497	2SV225509	BP 4050 A	M-05188428	Pembelian	27/11/2015	17.500.000,00
708	Biro Hukum	1.3.2.2.1.4.6	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1		HONDA	MEGA PRO	160 CC	-	MH1KC21114K009471	KC21E-10009502	BP 2127 A	H-04648673	Pembelian	30/10/2010	20.500.000,00
709	Biro Hukum	1.3.2.2.1.4.6	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	2		HONDA	Vario Techno	110 CC	-	MH1JF9117K05343	JF91E-1057014	BP 2129 A	H-04648676	Pembelian	31/12/2010	16.000.000,00
710	Biro Hukum	1.3.2.2.1.4.6	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	3		HONDA	New Mega Pro	160 CC	-	MH1KC21114K016817	KC21E-1016858	BP 2128 A	H-0464874	Pembelian	31/12/2010	19.300.000,00
711	Biro Hukum	1.3.2.2.1.4.6	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	4		HONDA	Vario Techno	110 CC	-	MH1JF91174K059733	JF91E-1061323	BP 2130 A	H-04648677	Pembelian	31/12/2010	16.000.000,00
712	Biro Hukum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	1		Toyota	Avanza 1.3 G A/T	G AT 1.300 cc	-	MHFM1BB3JBKO13553	DH93494	BP 1214 A	H-08395035	Pembelian	21/09/2011	176.000.000,00
713	Biro Hukum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	1		Suzuki	Ertiga 1.4 RAC DX AT	1500 CC	-	MHYKZE81110142	K14BT1110142	BP 1467 A	K-06975912	Pembelian	02/05/2014	185.430.000,00
714	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	1		COROLLA ALTIS	1.8 G A/T	1794	-	MR0532EC247401083	122-4369057	BP 10 A	D2645981	Pembelian	29/02/2004	296.400.000,00
715	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	2		COROLLA ALTIS		1794	-	MR032ZEC247401083	122-4369057	BP 10 A	D2645981	Pembelian	29/02/2004	296.400.000,00
716	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	8		camry	-	3000	-	-	-	-	-	Pembelian	04/01/2005	432.313.600,00
717	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	9		civic		2400	-	MRHCM56404P010046	K24A42800558	BP 1164 A	N-9542552	Pembelian	05/01/2005	368.686.800,00
718	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	11		civic		2400	-	MRHCM56405P010144	K24A43803232	BP 1198 A	D No-9542562	Pembelian	05/01/2005	368.686.800,00
719	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.1	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	1			-	-	-	MHFC1JU4050018336	W04D-JJ27765	BM 7103 HP	3215660	Pembelian	03/05/2004	427.084.000,00
720	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.2	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1		Toyota	Dyna Long	4000 cc	-	'MHCNK71LY5J-003505	'B - 003505	BP 7003 A	N-9542555	Pembelian	10/01/2005	427.084.000,00
721	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.2	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	2			-	-	-	MHC01K71(Y5)-003506	B-003506	BP 7004 A	9542556	Pembelian	10/01/2005	427.084.000,00
722	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		KIJANG INOVA	Innova G A/T	1998	-	MHFXW426642009413	1TR6020037	BP 76 A	N1788996	Pembelian	01/01/2004	225.900.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
723	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4		KIJANG INOVA	-	1998	-	-	MHFXW4266420 09413	BM 16 HQ	-	Pembelian	01/01/2004	225.900.000,00
724	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	5		PREGIO		2600	-	MHFXW42G852052343	J2-424098	BP 1038 A	8492023D	Pembelian	11/01/2005	191.752.000,00
725	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6		inova	Innova G A/T	2000	-	MHFXW42G852052300	1TR-6176397	BP 32 A	D7779818	Pembelian	11/01/2005	191.752.000,00
726	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7		inova	Innova G A/T	2000	-	MHFXW42G852052301	1TR-6174905	BP 1691 A	D - 7779819	Pembelian	11/01/2005	191.752.000,00
727	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	9		innova	Kijang Innova G A/T	2000	-	MHFXW42G052051884	ITR6173532	BP 35 A	D7779820	Pembelian	11/01/2005	191.752.000,00
728	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	10		innova		2000	-	MHFXW42G852052304	1TR-6184481	BP 36 A	N7779821	Pembelian	13/01/2005	175.409.091,00
729	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	12		innova		2000	-	MHFXW426952056369	1TR-6193626	BP 38 A	D-7779817	Pembelian	12/01/2005	175.409.091,00
730	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	13		innova		2000	-	MHFXW42G852056458	1TR-6194098	BP 39 A	D-7779823	Pembelian	12/01/2005	175.409.091,00
731	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	14		innova	-	2000	-	-	-	BM 40	-	Pembelian	12/01/2005	175.409.091,00
732	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	15		innova		2000	-	MHFXW42G852052309	1TR-6197046	BP 41 A	N7779827	Pembelian	12/01/2005	175.409.091,00
733	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	16		innova		2000	-	MHFXW42G852057707	1TR-6198327	BP 1550 A	D7444452	Pembelian	12/01/2005	175.409.091,00
734	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	17		innova		2000	-	MHFXW426952058011	1TR-6199898	BP 43 A	D-7779828	Pembelian	12/01/2005	175.409.091,00
735	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	18		innova		2000	-	MHFXW42G852052312	1TR 6272244	BP 1826 A	N0739556	Pembelian	12/01/2005	175.409.091,00
736	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	20		innova		2000	-	MHFXW42G562069363	1TR 6273582	BP 46 A	739558	Pembelian	12/01/2005	175.409.091,00
737	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	21		innova		2000	-	MHFXW42G852052315	1TR-6272721	BP 47 A	E0739559	Pembelian	12/01/2005	175.409.091,00
738	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	17		Suzuki	New Ertiga Dreza GS AT 2016		-	MHYKZE81SHJ310630	KI4BT1242380	BP 1635 A	M-10708522	Pembelian	15/06/2017	233.000.000,00
739	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	18		Suzuki	New Ertiga Dreza GS AT 2016		-	MHYKZE81SHJ310638	KI4BT1242353	BP 1631 A	M-10708523	Pembelian	15/06/2017	233.000.000,00
740	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	19		Suzuki	New Ertiga Dreza GS AT 2016		-	MHYKZE81SHJ310641	K14BT1242386	BP 1630 A	M-10708524	Pembelian	15/06/2017	233.000.000,00
741	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	20		Suzuki	New Ertiga Dreza GS AT 2016		-	MHYKZE81SHJ310928	K14BT1242810	BP 1623 A	M-10708527	Pembelian	15/06/2017	233.000.000,00
742	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	21		Suzuki	New Ertiga Dreza GS AT 2016		-	MHYKZE81SHJ310840	K14BT1242656	BP 1639 A	M-10708519	Pembelian	15/06/2017	233.000.000,00
743	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	22		Suzuki	New Ertiga Dreza GS AT 2016		-	MHYKZE81SHJ310781	K14BT1242605	BP 1621 A	M-10708528	Pembelian	15/06/2017	233.000.000,00
744	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	24		Suzuki	New Ertiga Dreza GS AT 2016		-	MHYKZE81SHJ310898	K14BT1242730	BP 1625 A	M-10708526	Pembelian	15/06/2017	233.000.000,00
745	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	10		YAMAHA ALL NEW SOUL	AKS SS / BU9		-	MH3SE9040HJ013900	E3W9E-0017697	BP 4210 A	M-10721892	Pembelian	05/10/2017	19.442.000,00
746	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	28		Toyota	All New Kijang Innova 2.0V A/T		-	MHFGW8EM1H1D1324 4	1TRA285565	BP 1565 A	M-11504230	Pembelian	26/05/2017	340.700.000,00
747	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	29		Toyota	All New Kijang Innova 2.0V A/T		-	MHFGW8EM9H1D1336 3	1TRA285565	BP 1566 A	M-11504231	Pembelian	26/05/2017	340.700.000,00
748	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	30		Toyota	All New Kijang Innova 2.0V A/T		-	MHFGW8EM6HD12994	1TRA280008	BP 1595 A	M-11504233	Pembelian	26/05/2017	340.700.000,00
749	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	143		Toyota Innova	V AT New	1998	-	MHFAW8EM6L0215436	1TR A796035	BP 1935 A	P-01951585	Pembelian	04/12/2020	368.000.000,00
750	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	144		Kijang Innova	G 2.0 A/T	1998	-	MHFJW8EM9L2383320	1TR A759161	BP 1925 A	P-01949054	Pembelian	27/08/2020	321.000.000,00
751	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	145		Toyota new	1.5 A/T TRD	1496	-	MHKE8FB3JLJ009011	2NR G506315	BP 1923 A	P-01949052	Pembelian	27/08/2020	259.000.000,00
752	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	146		Toyota new	1.5 A/T TRD	1496	-	MHKE8FB3JLJ008306	2NR F996717	BP 1924 A	P-01949053	Pembelian	27/08/2020	259.000.000,00
753	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	147		Pajero	SP2 4LK8AT		-	MMBGUKR10KH019993	4N15UGA6602	BP 1940 A	-	Pembelian	05/11/2020	525.000.000,00
754	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	148		TOYOTA-INNOVA	VENTURER DIESEL A/T NEW	1998	-	MHFAB3EMXL0017005	2GD 44845586	BP 1936 A	P-01951586	Pembelian	04/12/2020	450.000.000,00
755	Biro Umum	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	15		Toyota	Kijang Pick Up Standar	1781	-	MHF31KF6040034950	7K-0754087	BM 8954 AP	D-1266376	Hibah	15/12/1994	105.300.000,00
756	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.1	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	18		Mitsubishi		3900 cc	-	MHMFE84PBAJ002136	4D34TFF82049	BP 7510 A	H06212004	Pembelian	13/05/2010	441.940.458,00
757	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.5	Sport Utility Vehicle (SUV)	1		Toyota	2.7 SRZ 4x2 AT	-	-	-	-	-	-	Pembelian	12/04/2023	563.400.000,00
758	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	93		TOYOTA	HIACE	-	-	-	-	-	-	Pembelian	26/06/2023	621.500.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
759	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	94		TOYOTA	HIACE	-	-	-	-	-	-	Pembelian	26/06/2023	621.500.000,00
760	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.1	Mobil Ambulance	4		Suzuki	GC415V-APV SDX MT	-	-	-	-	-	-	Pembelian	22/11/2023	336.900.000,00
761	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	84		Yamaha	Mio M3 125	-	-	-	-	-	-	Pembelian	11/12/2023	18.730.000,00
762	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.1	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	2		Chasis HINO A215	-	-	-	MJEAK8JRK7F10138	J083UHJ10228	BP 7101 DU	E-9126053	Pembelian	05/03/2007	431.010.250,00
763	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.1	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	3		Chasis HINO A215	-	-	-	MJEAK8JRK7F10141	J083UHJ10231	BP 7102 DU	E-9126054	Pembelian	05/03/2007	431.010.250,00
764	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.1	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	4		Chasis HINO A215	-	-	-	MJEAK8JRK7F10140	J083UHJ10230	BP 7103 DU	E-9126054	Pembelian	05/03/2007	431.010.250,00
765	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.1	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	5		Chasis HINO A215	-	-	-	MJEAKJRK7F10144	J08EUHJ10234	BP 7104 DU	E-9126055	Pembelian	05/03/2007	431.010.250,00
766	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.1	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	6		Chasis HINO A215	-	-	-	MJEAK8JRK7F10143	J083UHJI0233	BP 7105 A	E-9126054	Pembelian	05/03/2007	431.010.250,00
767	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.1	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	7		Chasis HINO A215	-	-	-	MJEAK8JRK7F10139	J083UHJ10139	BP 7097 DU	E-9126053	Pembelian	05/03/2007	431.010.250,00
768	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.1	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	8		Chasis HINO A215	-	-	-	MJEAK8JRK7F10142	J083UHJ10232	BP 7109 DU	E-9126052	Pembelian	05/03/2007	431.010.250,00
769	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	1		Daihatsu Xenia	VVT-I Tipe EJ DOHC VVT-i	-	-	MHKV1AA2J6K-001707	DN-40925	BP 1030 A	E3116587	Pembelian	08/02/2006	129.600.000,00
770	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	6		Toyota Avanza	/ 1.3 S A/T	-	-	MHFM1BA3J6K004697	DB61648	BP 1632 A	N-1503893	Pembelian	08/02/2006	135.286.800,00
771	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	9		Toyota Avanza	/ 1.3 S A/T	-	-	MHFM1BA3J6K005600	DB62938	BP 1009 A	E No-2824033	Pembelian	08/02/2006	135.286.800,00
772	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	10		Toyota Avanza	/ 1.3 S A/T	-	-	MHFM1BA3J6K-005297	DB62351	BP 1010 A	N2824034	Pembelian	08/02/2006	135.286.800,00
773	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	37		New Avanza Veloz 1500 At	-	-	-	MHKM1CB4JCK007622	3SZ-DCW8203	BP 1608 A	J00059810	Pembelian	10/02/2012	179.000.000,00
774	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	39		Kijang Innova G At Luxury Bensin	-	-	-	NHFXW42G0C2232433	1TR7365331	BP 1602 A	J-00056007	Pembelian	10/02/2012	259.500.000,00
775	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	41		Kijang Innova G At Luxury Bensin	-	-	-	'MHFXW42G9C2231619	'1TR-7355231	BP 1604 A	J00056009	Pembelian	10/02/2012	259.500.000,00
776	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	17		Suzuki Thunder	-	125cc	-	-	-	-	-	Pembelian	29/07/2011	22.330.000,00
777	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	18		Honda Supra X		2 110cc	-	-	-	-	-	Pembelian	12/12/2011	19.085.000,00
778	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	16		toyota	CAMRY 3.0 A/T	-	-	MR053XK 3044000196	1MZ 1740304	BP 5	D1788993	Pembelian	07/06/2004	432.313.600,00
779	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	17		honda	honda accord	2354 CC	-	MRHCMB6405P010149	K24A43803238	BM 98 EP	N-9542558	Pembelian	22/06/2004	368.686.800,00
780	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	18		toyota	CROWN 3.0 A/T	2994 cc	-	JTDBK864251004077	3GR-0079966	BP 1946 A	D3215727	Pembelian	24/06/2004	504.000.000,00
781	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	20		honda	Accord 2.4	2354 CC	-	MRHCM56405P010144	K24A43803232	BM 96 EP	D No-9542562	Pembelian	02/07/2004	368.686.800,00
782	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	81		toyota	INNOVA G A/T	-	-	MHFXW42G952013635	1TR-6025801	BP 1933 A	D2645985	Pembelian	17/06/2004	225.900.000,00
783	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	65		Toyota Kijang Innova	V A T Lux Bensin	-	-	MHFXW43G4D4078393	1TR-7559431	BP 1318 A	K02754913	Pembelian	07/05/2013	296.250.000,00
784	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	66		Toyota Avanza	-	-	-	MHKM1BB3JDK012784	MB11496	BP 1309 A	K-02754910	Pembelian	07/05/2013	176.150.000,00
785	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	68		Toyota Avanza	-	-	-	MHKM1BB3JDK013487	MB33943	BP 1321 A	K-02754993	Pembelian	07/05/2013	176.150.000,00
786	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.3	Mobil Unit Penerangan Darat	1		Toyota New Fortuner 2.5 G A/T TRD DIESEL	-	-	-	MHFZR69G1D3075301	2KD-U390098	BP 1398 A	K06975701	Pembelian	17/03/2014	440.200.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
787	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.3	Mobil Unit Penerangan Darat	12		Toyota New Kijang Innova G A/T GASOLINE	-	-	-	MHFXW42G9E2286302	1TR-7777128	BP 1236 A	K-06975892	Pembelian	20/01/2014	271.550.000,00
788	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.3	Mobil Unit Penerangan Darat	3		Toyota New Kijang Innova G A/T GASOLINE	-	-	-	MHFXW42G9E2286834	1TR-7784201	BP 1239 A	K-06975894	Pembelian	20/01/2014	271.550.000,00
789	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.18	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	1		Toyota Kijang	pic Up (Karesori)	1800 CC	-	MHF31KF6060050334	7K-0849602	BP 1027 A	1894551	Pembelian	15/02/2006	189.145.000,00
790	Biro Umum	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	3		Toyota Kijang	/ Flat Deck	1800 CC	-	MHF31KF6060047021	7K. 0823959	BP 8003 A	E1503898	Pembelian	23/02/2006	107.644.337,00
791	Dinas Perpustakaan Daerah Dan Kearsipan	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	5		Isuzu	D Max 2.4 MT WD	1800 CC	-	MPATFS77H6H-571622	369276	BP 8001 A	F-9431788	Pembelian	23/02/2006	259.375.565,00
792	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	12			-	-	-	MHCNH55EEY6J-017211	M017211	BP 7501 A	E4602884	Pembelian	19/12/2006	295.583.948,00
793	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	14			-	-	-	MHCNK71LY6J-005204	B005204	BP 7504 A	N-4602881	Pembelian	19/12/2006	295.583.948,00
794	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	16			-	-	-	MHCNK71LX6J-005201	B005201	BP 7503 A	E 4602880	Pembelian	19/12/2006	295.583.948,00
795	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	6		Honda Mega Pro		1600 CW / Sport	-	MHIKCIII96KO40615	KCIIE.1040781	BP 2566 A	3114979	Pembelian	23/02/2006	19.650.000,00
796	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	7		Honda Mega Pro		1600 CW / Sport	-	MHIKCIII36K042022	KCIIE-1040574	BP 2569 A	3114978	Pembelian	23/02/2006	19.650.000,00
797	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.18	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	2		Mitsubishi	FE 83 BC 6 Ban	-	-	'MHMFE83PA8J000107	'4D34T-D85828	BP 7000 A	N2204930	Pembelian	03/09/2008	714.890.000,00
798	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	33		Toyota	Innova	-	-	'MHFXW4G680034542	'1TR-6689538	BP 1071 A	N3129621	Pembelian	05/09/2008	214.500.000,00
799	Biro Umum	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	10		Toyota Hilux	-	-	-	MR0AW12G3D0037814	1TR7514076	BP 8051 A	K-02754916	Pembelian	07/05/2013	151.900.000,00
800	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	23		Honda New Vario Techno		125	-	MH1JFF11DK048192	JFF1E10486887	BP 2359 A	K-05889041	Pembelian	07/05/2013	16.209.000,00
801	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	24		Honda New Vario Techno		125	-	MH1JFF118DK048184	JFF1E1048688	BP 2394 A	K - 05889034	Pembelian	07/05/2013	16.209.000,00
802	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	25		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC4117DK059162	KC41E 1059263	BP 2354 A	K-05889037	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00
803	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	26		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC4115DK059306	KC41E 1059363	BP 2373 A	K-05889045	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00
804	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	27		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC4116DK062103	KC41E 1061991	BP 2368 A	K-05889049	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00
805	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	28		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC4111DK062137	KC41E 1062032	BP 2376 A	K-05889019	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00
806	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	29		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC411XDK062136	KC41E 1062096	BP 2358 A	K0889040	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00
807	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	30		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC4113DK062138	KC41E 1062098	BP 2392 A	K-05889031	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00
808	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	31		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC4117DK062143	KC41E 1062138	BP 2379 A	K-05889021	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
809	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	32		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC4119DK062404	KC41E 1062292	BP 2360 A	K05889042	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00
810	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	33		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC4112DK064463	KC41E 1064164	BP 2381 A	K05889023	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00
811	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	34		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC4111DK073042	KC41E 1073075	BP 2362 A	K05889044	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00
812	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	35		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC4115DK073805	KC41E 1073822	BP 2365 A	K05889047	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00
813	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	36		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC411XDK073797	KC41E 1073831	BP 2372 A	K05889016	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00
814	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	37		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC4116DK073795	KC41E 1073876	BP 2369 A	K05889050	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00
815	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	38		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC4119DK073810	KC41E 1073878	BP 2370 A	K05889014	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00
816	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	39		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC4113DK073818	KC41E 1074030	BP 2367 A	K05889048	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00
817	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	40		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC4117DK062367	KC41E 1061789	BP 2389 A	K05889029	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00
818	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	19		Kawasaki LX150D	-	-	-	MH4LX150DCKP14994	LX150CEP96286	BP 6031 A	J04368711	Pembelian	16/04/2012	27.900.000,00
819	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	20		Kawasaki LX150D	-	-	-	MH4LX150DCKP15107	LX150CEP96584	BP 6032 A	J04368712	Pembelian	16/04/2012	27.900.000,00
820	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	21		Vario Techno CBS	-	-	-	MH1JFC114CK151793	JFCLE-1152134	BP 2601 A	K00702944	Pembelian	16/04/2012	15.230.000,00
821	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	22		Vario Techno CBS	-	-	-	MH1JFC111CK153825	JFCLE-1154401	BP 2602 A	K00702945	Pembelian	16/04/2012	15.230.000,00
822	Biro Umum	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	9		Hilux Double Cabin 2.5 4 x 4 G MT	-	-	-	MR0FR22G1C0625860	2KD-5932010	BP 8106 A	J - 04368460	Pembelian	23/04/2012	321.000.000,00
823	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	44		New Avanza Veloz 1500 At	-	-	-	MHKM1CB4JCK013708	DDC7300	BP 1612 A	J-04368446	Pembelian	23/04/2012	180.000.000,00
824	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	46		Suzuki APV Arena	-	-	-	MHYGDN42V9J324324	G15AID-190300	BP 1077 A	F-4761223	Pembelian	11/11/2009	170.802.500,00
825	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	22		Toyota New Camry	2400 V AT	2400 CC	-	MRO53BK4079003037	24Z.E064672	BP 1163 A	E-7523431	Pembelian	20/03/2007	426.800.000,00
826	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	23		Toyota New Camry	2400 V AT	2400 CC	-	MRO53BK4079003244	24Z.E068515	BP 1161 A	E-7523429	Pembelian	20/03/2007	426.800.000,00
827	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	24		Toyota New Corolla	Altis 1.800 G AT	1800 CC	-	MRO53ZEC277405233	IZZ.4678822	BP 12	E-7523317	Pembelian	10/04/2007	320.100.000,00
828	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	25		Toyota New Corolla	Altis 1.800 J MT	1800 CC Patwal	-	MR053ZEC277405370	1ZZ-4667404	BP 1290 A	N8986856	Pembelian	14/05/2007	300.300.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
829	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	30		Toyota Innova Toyota Inova	-	-	-	MHFXW42G072102495	1TR-6451821	BP 1687 A	N7523327	Pembelian	25/04/2007	211.070.200,00
830	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	33		Toyota Innova Toyota Inova	-	-	-	'MHFXW42G872103166	'1TR 6459432	BP 1160 A	N7523337	Pembelian	25/04/2007	211.070.200,00
831	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	34		Toyota Innova Toyota Inova	-	-	-	MHFXW426472100409	1TR-6432106	BP 1490 A	N7523323	Pembelian	25/04/2007	211.070.200,00
832	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	35		Toyota Innova Toyota Inova	-	-	-	MHFXW426072100701	1TR-6435258	BP 1683 A	N7523324	Pembelian	25/04/2007	211.070.200,00
833	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	36		Toyota Innova Toyota Inova	-	-	-	MHFXW42G872102065	1TR.6448250	BP 1459 A	E-7523325	Pembelian	25/04/2007	211.070.200,00
834	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	37		Toyota Innova Toyota Inova	-	-	-	MHFXW42G852052335	1TR-6456439	BP 1574 A	N7523326	Pembelian	25/04/2007	211.070.200,00
835	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	45		Toyota	Camry 3.5 Q AT	-	-	MR053KK40B9002421	2GR0801137	BP 1942 A	I-04198061	Pembelian	14/09/2011	673.200.000,00
836	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	50		Toyota	Innova G AT	1.998 cc	-	MHFXW42G2B2193908	1TR7137607	BP 1219 A/BP 68 A	H-08395040	Pembelian	22/08/2011	261.030.000,00
837	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	53				G AT 1.300 cc	-	MHFM1BB3JBKO13227	DH79357	BP 1209 A	H-08395032	Pembelian	21/09/2011	176.000.000,00
838	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	59				G AT 1.300 cc	-	MHFM1BB3JBKO13645	DH94535	BP 1217 A	H08395038	Pembelian	21/09/2011	176.000.000,00
839	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	60		Toyota Rush		G AT 1.500 cc	-	MHFE2CK2JBKOO1912	DCE6845	BP 1225 A	I-04194377	Pembelian	21/07/2011	223.300.000,00
840	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	61		Toyota Rush		G AT 1.500 cc	-	MHFE2CK2JBKOO1946	DCE8550	BP 1226 A	I-04194378	Pembelian	21/07/2011	223.300.000,00
841	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	62		Toyota Rush		G AT 1.500 cc	-	MHFE2CK2JBKOO1876	DCE3415	BP 1227 A	I-04194379	Pembelian	21/07/2011	223.300.000,00
842	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	63		Toyota Rush		G AT 1.500 cc	-	MHFE2CK2JBKOO1845	DCE0970	BP 1228 A	I-04194380	Pembelian	21/07/2011	223.300.000,00
843	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	64		Toyota Rush		G AT 1.500 cc	-	MHFE2CK2JBKOO1912	DCE6845	BP 1229 A	I04194381	Pembelian	21/07/2011	223.300.000,00
844	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	75		Toyota Kijang Innova	-	-	-	MHFXW43G9D4078471	1TR7561460	BP 1317 A	K-02754918	Pembelian	09/04/2013	296.250.000,00
845	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	76		Toyota Kijang Innova E A/T	-	-	-	MHFXW41G3D0057612	1TR7559013	BP 1315 A	K - 02754915	Pembelian	03/06/2013	232.500.000,00
846	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	78		Avanza Veloz 1.5 A/T New	-	-	-	MHKM1CB4JDK028417	3SZ-DEC6968	BP 1428 A	K00548767	Pembelian	02/10/2013	191.442.663,00
847	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.2	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	8		Toyota Alphard S 2.4 A/T	-	-	-	ANH20-8300379	2AZG257275	BP 1944 A	k-00548877	Pembelian	05/11/2013	897.985.000,00
848	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	79		Toyota Alphard S 2.4 A/T	-	-	-	ANH208300564	2AZG257680	BP 1945 A	K-00548876	Pembelian	11/11/2013	897.985.000,00
849	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.3	Mobil Unit Penerangan Darat	6		ISUZU	NKR71E2-2	-	-	MHCNKR71HEJ059429	B059429	BP 9126 A	K06998049	Pembelian	13/03/2014	974.570.000,00
850	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.4	Mobil Pemadam Kebakaran	4		HINO	-	-	-	MJEC1JG43E5106106	W04DTRR05767	BP 9124 A	K06998048	Pembelian	02/06/2014	1.144.740.000,00
851	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	55		Honda Vario Techno 125 CBS 2014	-	-	-	MH1JFK110EK059383	JFK1E1000242	BP 2174 A	L03552632	Pembelian	14/01/2014	16.807.000,00
852	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	56		Honda Vario Techno 125 CBS 2014	-	-	-	MH1JFK110EK055169	JFK1E1055350	BP 2167 A	L-03552626	Pembelian	14/01/2014	16.807.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	57		Honda Vario Techno 125 CBS 2014	-	-	-	MH1JFK110EK033903	JFK1E1033556	BP 2175 A	L-03552633	Pembelian	14/01/2014	16.807.000,00
854	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	58		Honda Vario Techno 125 CBS 2014	-	-	-	MH1JFK116EK003905	JFK1E1033564	BP 2182 A	L-03552638	Pembelian	14/01/2014	16.807.000,00
855	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	59		Honda Vario Techno 125 CBS 2014	-	-	-	MH1JFK112EK033948	JFK1E1033513	BP 2183 A	L03552639	Pembelian	14/01/2014	16.807.000,00
856	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	60		Honda Vario Techno 125 CBS 2014	-	-	-	MH1JFK111EK034198	JFK1E1033563	BP 2165 A	L03552625	Pembelian	14/01/2014	16.807.000,00
857	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	61		Honda Vario Techno 125 CBS 2014	-	-	-	MH1JFK118EK034196	JFK1E1033548	BP 2162 A	L03552622	Pembelian	14/01/2014	16.807.000,00
858	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	63		Honda Vario Techno 125 CBS 2014	-	-	-	MH1JFK112EK033938	JFK1E1033595	BP 2184 A	L03552640	Pembelian	14/01/2014	16.807.000,00
859	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	64		Honda Vario Techno 125 CBS 2014	-	-	-	MH1JFK112EK033951	JFK1E1033507	BP 2178 A	L- 03552635	Pembelian	14/01/2014	16.807.000,00
860	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	65		Honda Vario Techno 125 CBS 2014	-	-	-	MH1JFK119EK042565	JFK1E1042736	BP 2164 A	L03552624	Pembelian	14/01/2014	16.807.000,00
861	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	66		Honda Vario Techno 125 CBS 2014	-	-	-	MH1JFK114EK034180	JFK1E1033542	BP 2176 A	L03552634	Pembelian	14/01/2014	16.807.000,00
862	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	41		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC4113DK062379	KC41E 1062296	BP 2356 A	K05889038	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00
863	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	42		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC4118DK062362	KC41E 1062309	BP 2378 A	K 05889020	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00
864	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	43		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC4114DK062309	KC41E 1062359	BP 2357 A	K-05889039	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00
865	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	44		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC4110DK062372	KC41E 1062425	BP 2375 A	K-05889018	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00
866	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	45		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC4113DK062365	KC41E 1062475	BP 2353 A	K-05889036	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00
867	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	46		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC4113DK062351	KC41E 1062498	BP 2352 A	K-05889035	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
868	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	47		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC4115DK062383	KC41E 1062552	BP 2390 A	K-05889030	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00
869	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	48		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC4115DK062349	KC41E 1062557	BP 2371 A	K-05889015	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00
870	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	49		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC4111DK063532	KC41E 1063194	BP 2380 A	K-05889022	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00
871	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	50		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC4114DK063508	KC41E 1063567	BP 2364 A	K-05889046	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00
872	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	51		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC4115DK063517	KC41E 1063610	BP 2361 A	K-05889043	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00
873	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	52		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC4111DK071632	KC41E 1071717	BP 2383 A	K05889024	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00
874	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	53		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC4119DK072057	KC41E 1071870	BP 2374 A	K05889025	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00
875	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	54		Honda Street Fire CB150R	Honda Street Fire	-	-	KC4110DK073727	KC41E 1073440	BP 2384 A	K05889025	Pembelian	07/05/2013	22.188.000,00
876	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	2		-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	09/05/2013	124.520.000,00
877	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	50		Toyota Camry	-	-	-	MR053AK50D4502477	2AR-U022085	BP 1584 A	K- 06976329	Pembelian	11/03/2014	594.550.000,00
878	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	51		Toyota Camry	-	-	-	MR053AK50D4602477	2ARU022085	BP 1548 A	K-06976329	Pembelian	11/03/2014	594.550.000,00
879	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	55		Toyota Altis	-	-	-	MR053REH2E4000532	2ZR-Y039243	BP 1586 A	K06976327	Pembelian	04/03/2014	470.800.000,00
880	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	56		Nissan	All New Nissan Teana 2.5 XV	-	-	MNTBCAL33Z0-001634	QR25-763427B	BP 1269 A	K06998018	Pembelian	07/04/2014	589.050.000,00
881	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	57		Nissan	All New Nissan Teana 2.5 XV	-	-	MNTBCAL33Z0-002270	QR25-042244L	BP 1268 A	K-06998017	Pembelian	07/04/2014	589.050.000,00
882	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	58		Nissan	All New Nissan Teana 2.5 XV	-	-	MNTBCAL33Z0-002280	QR25-041619L	BP 1267 A	K-06998016	Pembelian	07/04/2014	589.050.000,00
883	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	59		Suzuki Ertiga 1.4 RAC DX AT	-	-	-	MHYKZE81SEJ212600	K14BT1110069	BP 1460 A	K06975901	Pembelian	02/05/2014	185.430.000,00
884	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	61		Suzuki Ertiga 1.4 RAC DX AT	-	-	-	MHYKZE81SEJ212742	K14BT1110226	BP 1821 A	K-06975910	Pembelian	02/05/2014	185.430.000,00
885	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	64		Suzuki Ertiga	-	-	-	MHYKZE81SEJ214297	K14BT1117472	BP 1462 A	K-06975903	Pembelian	11/03/2014	185.430.000,00
886	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	65		Suzuki Ertiga	-	-	-	MHYKZE81SEJ210722	K14BT1109874	BP 1461 A	K-06975902	Pembelian	11/03/2014	185.430.000,00
887	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	69		Suzuki Ertiga	-	-	-	MHYKZE81SEJ207203	K14BT1099729	BP 1453 A	K-06975805	Pembelian	17/02/2014	186.870.000,00
888	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	67		Honda Vario Techno 125 CBS 2014	-	-	-	MH1JFK11XEK033955	JFK1E1033483	BP 2173 A	L- 03552631	Pembelian	14/01/2014	16.807.000,00
889	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	68		Honda Vario Techno 125 CBS 2014	-	-	-	MH1JFK117EK033959	JFK1E1033421	BP 2163 A	L- 03552623	Pembelian	14/01/2014	16.807.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
890	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	69		Honda Vario Techno 125 CBS 2014	-	-	-	MH1JFK111EK111913	JFK1E1110501	BP 2180 A	L- 03552637	Pembelian	14/01/2014	16.807.000,00
891	Biro Umum	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	11		New Hilux Std M/T	-	-	-	MR0AW12G0D0042694	1TR-7653743	BP 8213 A	K-00548762	Pembelian	17/09/2013	158.900.000,00
892	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	71		Avanza Veloz 1.5 A/T New	-	-	-	MHKM1CB4JDK028076	DEB8769	BP 1426 A	K-00548766	Pembelian	18/09/2013	191.442.663,00
893	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.6	Mobil Tangki Air	5		HINO	-	-	-	MJEFG8JKKEJG29528	J08EUGJ43860	BP 9130 A	L019129	Pembelian	10/02/2014	759.250.000,00
894	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.6	Mobil Tangki Air	6		HINO	-	-	-	MJEFG8JKKEJG29884	J08EUGJ44436	BP 9132 A	L01912912	Pembelian	10/02/2014	759.250.000,00
895	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.6	Mobil Tangki Air	7		HINO	-	-	-	MHCNKR71HEJ059794	B059794	BP 9127 A	L01912908	Pembelian	17/03/2014	419.600.000,00
896	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.6	Mobil Tangki Air	8		HINO	-	-	-	MJEC1JG43E5112359	W04DTRR11790	BP 9128 A	L01912909	Pembelian	04/03/2014	362.700.000,00
897	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.6	Mobil Tangki Air	9		HINO	-	-	-	MJEC1JG43E5112360	W04DTRR11796	BP 9129 A	L01912910	Pembelian	04/03/2014	362.700.000,00
898	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.6	Mobil Tangki Air	10		HINO	-	-	-	MJEC1JG43E5112361	W04DTRR11798	BP 9134 A	L-01912914	Pembelian	04/03/2014	362.700.000,00
899	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	70		Kawasaki Ninja 250 Fi (EX250L)	EX 250 L ABS	-	-	JKAEX250LDDA47471	EX250LEA54674	BP 6514 A	K12478802	Pembelian	23/09/2013	78.925.000,00
900	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	71		Kawasaki Ninja 250 Fi (EX250L)	EX 250 L ABS	-	-	JKAEX250LDDA40341	EX250LEA43869	BP 6127 A	K12478805	Pembelian	23/09/2013	78.925.000,00
901	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.3	Mobil Unit Penerangan Darat	7		Pick up Suzuki	-	-	-	MHYGDN41TEJ414391	G15AID332590	BP 8203 A	L01912526	Pembelian	06/05/2014	118.250.000,00
902	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	83		Karoseri Harmony Long G, Chasis Hino 110	-	-	-	MJEFB2WGLDJE13799	W04DTNJ83799	BP 7130 A	K00548929	Pembelian	27/09/2013	392.500.000,00
903	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.2	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	11		Karoseri Road Master G, Chasis Hino FB 130	-	-	-	MJEFB2WGLDJE13797	W04DTNJ83797	BP 7132 A	K - 00548943	Pembelian	30/09/2013	591.666.667,00
904	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.2	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	12		Karoseri Road Master G, Chasis Hino FB 130	-	-	-	MJEFB2WGLDJE13799	W04DTNJ83799	BP 7133 A	K00548944	Pembelian	30/09/2013	591.666.667,00
905	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	78		Yamaha New Aerox 155VVA (standart version)			-	MH3SG4610JJ138780	G3J1E0216431	BP 4738 A	-	Pembelian	29/11/2018	24.303.000,00
906	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	79		Yamaha New Aerox 155VVA (standart version)			-	MH3SG4610JJ107061	G3J1E0151706	BP 4739 A	-	Pembelian	29/11/2018	24.303.000,00
907	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	132		Honda Odyssey 2.4L Prestige CVT (VIN 2018)			-	JHMRC1875JC340143	K24W72401989	BP 1684 A	N-09088650	Pembelian	18/09/2018	687.480.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
908	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	133		Misubishi Pajero Sport 2,4L dakar Ultimate (4x2) 8			-	MK2KRWFNUJJ001933	4N15UCY6326	BP 1736 A	N-09128178	Pembelian	16/11/2018	561.847.600,00
909	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	80		Toyota New Corolla Altis 1,8 V A/T Vin 2018			-	MR053REH2J4104594	2ZRY535970	BP 1693 A	N-09112540	Pembelian	10/12/2018	455.300.000,00
910	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	72		Yamaha New Vixion Lightning	-	-	-	MH31PA004E595973	1PA-594143	BP 4201 A	L-06119472	Pembelian	05/03/2014	24.239.000,00
911	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	73		Yamaha New Vixion Lightning	-	-	-	MH31PA004EK493687	1PA-492904	BP 4204 A	L - 06119475	Pembelian	05/03/2014	24.239.000,00
912	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	74		Yamaha New Vixion Lightning	-	-	-	MH31PA004EK613613	1PA-610795	BP 4203 A	L-06119474	Pembelian	05/03/2014	24.239.000,00
913	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	75		Yamaha New Vixion Lightning	-	-	-	MH31PA004EK515750	1PA-516250	BP 4202 A	L-06119473	Pembelian	05/03/2014	24.239.000,00
914	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.11	Mobil Unit Panggung	1		Karoseri Isuzu NKR 71 HD		60 x 60 x 55 cm	-	MHCNKR71HEJ060558	B060558	BP 9137 A	L-03560116	Pembelian	10/03/2014	540.000.000,00
915	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.3	Mobil Unit Penerangan Darat	10		Toyota All New Camry 2.5 V A/t	-	-	-	MR053AK50E4506623	2AR-U167264	BP 1328 A	L03560315	Pembelian	05/02/2014	529.500.000,00
916	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.3	Mobil Unit Penerangan Darat	11		Toyota New Fortuner 2.5 G A/T TRD DIESEL	-	-	-	MHFZR69G5E3113873	2KD U661429	BP 1329 A	L03560316	Pembelian	19/05/2014	443.200.000,00
917	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	84		Isuzu	-	-	-	MHCNKR55HEJ059743	M059743	BP 7027 A	L-03560377	Pembelian	22/01/2014	472.790.000,00
918	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	85		Type A - Karoseri	Isuzu	-	-	MHCN1R71LEJ063268	B063268	BP 7025 A	L03560373	Pembelian	06/01/2014	685.250.000,00
919	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	86		Type A - Karoseri	Isuzu	-	-	MHCN1R7LEJ063269	B063269	BP 7024 A	L03560375	Pembelian	06/01/2014	685.250.000,00
920	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	134		TOYOTA	Innova 2.0 V A/T	-	-	MHFGW8EM9G1006833	1TR-141321	BP 1539 A	L-11194693	Pembelian	23/05/2016	335.100.000,00
921	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	135		SUZUKI	New Ertiga SGX AT	-	-	MHYKZE81SGJ320681	K14BT1195484	BP 1564 A	L-11194680	Pembelian	23/05/2016	208.460.000,00
922	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	139		SUZUKI ALL NEW	G/L AT		-	MHYANC22SKJ100552	K15BT1030116	BP 1694 A	N-09137345	Pembelian	24/06/2019	232.002.925,00
923	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	140		TOYOTA LAND CRUISER	PRADO TXL		-	TRJ1500098636	2TR2121612	BP 1868 A	N-09140007	Pembelian	29/08/2019	1.786.400.000,00
924	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	141		TOYOTA INNOVA G AT			-	MHFJW8EM4K2375480	1TR A675464	BP 1891 A	P-01944118	Pembelian	02/12/2019	321.000.000,00
925	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	142		TOYOTA INNOVA G AT			-	MHFGW8EM2K1029301	1TR A706325	BP 1696 A	P-01944130	Pembelian	13/12/2019	368.000.000,00
926	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	90		Toyota Innova G AT			-	MHFJW8EM2K2377569	1TR A698674	BP 1697 A	P-01944142	Pembelian	13/12/2019	321.000.000,00
927	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	72		Kijang innova	-	-	-	MHFXW42G262071989	1TR-6289117	BP 1044 A	E0739587	Pembelian	21/03/2005	188.090.909,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
928	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	74		Kijang innova	-	-	-	MHFXW42G362071760	1TR-6285755	BP 1908 A	E-0739578	Pembelian	21/03/2005	188.090.909,00
929	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	79		Kijang innova	-	-	-	MHFXW42G562071968	1TR-6289344	BP 1327 A	E-0739580	Pembelian	21/03/2005	188.090.909,00
930	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	80		Kijang innova	-	-	-	MHFXW42G962074217 0	1TR-6290503	BP 1827 A	N0739575	Pembelian	21/03/2005	188.090.909,00
931	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	81		Kijang innova	-	-	-	MHFXW42G962072394	1TR-6291800	BP 84 A	E-0739577	Pembelian	21/03/2005	188.090.909,00
932	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	82		Kijang innova	-	-	-	MHFXW42G762069042	1TR 6271524	BP 88 A	E0739581	Pembelian	21/03/2005	188.090.909,00
933	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	81		Toyota New Camry 2,5 V A/T	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	31/08/2022	673.000.000,00
934	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	91		Toyota Fortuner New 2.4 VRZ A/T 4x2 GT SPORT Putih	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	31/03/2022	555.200.000,00
935	Biro Umum	1.3.2.2.1.3.7	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	2		Kaisar Triseda M/T	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	20/06/2022	35.500.000,00
936	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	83		Yamaha warna hitam	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	27/07/2022	19.440.000,00
937	Biro Umum	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	16		New Carry Pick Up WD AC PS BP 8257 A	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	24/11/2022	171.000.000,00
938	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	92		Toyota Innova 2.0 G A/T Luxury Hitam BP 1284 AA	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	30/05/2022	373.700.000,00
939	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.1	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	20		Hino type GB 150 L AT	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	22/12/2022	1.774.335.000,00
940	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	149		TOYOTA INNOVA 2.0 G A/T	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	06/12/2022	376.200.000,00
941	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	109		SUZUKI	ERTIGA GX AT VIN 2015	-	-	MHYKZE81SFJ248727	K14BT1152205	BP 1271 A	L03562759	Pembelian	26/03/2015	213.871.200,00
942	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	110		SUZUKI	ERTIGA GX AT VIN 2015	-	-	MHYKZE81SFJ251897	K14BT1155177	BP 1273 A	L03562742	Pembelian	26/03/2015	213.871.200,00
943	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	111		SUZUKI	ERTIGA GX AT VIN 2015	-	-	MHYKZE81SFJ251902	K14BT1155583	BP 1272 A	L03562752	Pembelian	26/03/2015	213.871.200,00
944	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	112		SUZUKI	ERTIGA GX AT VIN 2015	-	-	MHYKZE81SFJ250077	K14BT1153708	BP 1275 A	L03562750	Pembelian	26/03/2015	213.871.200,00
945	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	113		SUZUKI	ERTIGA GX AT VIN 2015	-	-	MHYKZE81SFJ250358	K14BT1153856	BP 1279 A	L03562755	Pembelian	26/03/2015	213.871.200,00
946	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	114		SUZUKI	ERTIGA GX AT VIN 2015	-	-	MHYKZE81SFJ252633	K14BBT1156016	BP 1270 A	L - 03562760	Pembelian	26/03/2015	213.871.200,00
947	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	115		SUZUKI	ERTIGA GX AT VIN 2015	-	-	MHYKZE81SFJ250245	K14BT1152888	BP 1283 A	L03562762	Pembelian	26/03/2015	213.871.200,00
948	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	116		SUZUKI	ERTIGA GX AT VIN 2015	-	-	MHYKZE81SFJ251843	K14BT1155311	BP 1285 A	L03562753	Pembelian	26/03/2015	213.871.200,00
949	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	117		SUZUKI	ERTIGA GX AT VIN 2015	-	-	MHYKZE81SFJ250972	K14BT1154420	BP 1278 A	L03562758	Pembelian	26/03/2015	213.871.200,00
950	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	118		SUZUKI	ERTIGA GX AT VIN 2015	-	-	MHYKZE81SFJ248117	K14BT1151504	BP 1276 A	L03562754	Pembelian	26/03/2015	213.871.200,00
951	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	80		Toyota All New Kijang Innova 2.0G M/T Vin 2017			-	MHFGW8EM4H233971 7	1TRA368572	BP 1670 A	M-11509157	Pembelian	12/10/2017	285.900.000,00
952	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	12		Kawasaki	ER 250CC		-	JKAER250CHDAB2061	EX250LEAE1727	BP 6048 A	M-11509194	Pembelian	15/11/2017	99.923.350,00
953	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	13		Kawasaki	ER 250CC		-	JKAER250CHDAB2073	EX250LEAE1739	BP 6049 A	M-11509195	Pembelian	15/11/2017	99.923.350,00
954	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	42		Kijang Innova G At Luxury Bensin	-	-	-	MHFXW42G9C2231768	1TR-7360658	BP 1605 A	J00056010	Pembelian	10/02/2012	259.500.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
955	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.4	Mobil Pemadam Kebakaran	3		Hino	-	-	-	MJEFG8JJKCJG15132	J08EUGJ 30946	BP 7102 A	J00056149	Pembelian	10/02/2012	2.040.500.000,00
956	Biro Umum	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	8		Hilux Pick Up STD 4x2 Bensin Manual New	-	-	-	MROAW12G1C0033307	1TR-7367956	BP 8105 A	J02141938	Pembelian	10/02/2012	150.450.000,00
957	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.2	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	9		Hino	-	-	-	MJEFB2WGLCJE - 13461	W04DTNJ - 83461	BP 7204 A	J02151070	Pembelian	29/02/2012	735.900.000,00
958	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.2	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	10		Hino	-	-	-	MJEFB2WGLCJE - 13460	W04DTNJ - 83460	BP 7203 A	J02151071	Pembelian	29/02/2012	735.900.000,00
959	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.3	Mobil Unit Penerangan Darat	4		Toyota New Kijang Innova G A/T GASOLINE	-	-	-	MHFXW42G1E2287301	1TR-7786937	BP 1235 A	K-06975930	Pembelian	20/01/2014	271.550.000,00
960	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.3	Mobil Unit Penerangan Darat	5		Toyota New Kijang Innova G A/T GASOLINE	-	-	-	MHFXW42G3E2287879	1TR-7788209	BP 1248 A	K06975895	Pembelian	20/01/2014	271.550.000,00
961	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	22		innova		2000	-	MHFXW42G162069375	1TR 6272610	BP 1560 A	N0739560	Pembelian	12/01/2005	175.409.091,00
962	Biro Adminitrasi Kesejahteraan Rakyat	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	24		Avanza		1300	-	MHFFIMRHK35K001563	PIS15045	BP 100 A	D7779824	Pembelian	01/02/2005	123.454.545,00
963	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	25		Innova		2000	-	MHFXW42G-452052438	1TR-6177328	BM 1026 EP	D9542553	Pembelian	08/02/2005	225.900.000,00
964	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	27		-	-	-	-	-	-	BM 8022 EP	-	Pembelian	10/02/2005	130.740.000,00
965	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	28			-	-	-	MJJTB73125K.00184	J2.424351	BP 1762 A	D-8492022	Pembelian	16/02/2005	191.576.000,00
966	Biro Umum	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	1		PANTER		1800	-	MHCTBR54B5K-127913	E-127913	BP 8025 A	N-8492150	Pembelian	03/02/2005	130.740.000,00
967	Biro Umum	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	2		panther		2500	-	MHCTBR54B5K.129226	E.129226	BM 8022 EP	8492151	Pembelian	03/02/2005	156.888.000,00
968	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.4	Mobil Pemadam Kebakaran	1		-	-	-	-	-	-	BP 8027 A	-	Pembelian	15/02/2005	539.982.800,00
969	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		tiger		200	-	MHIS4BJ125K035217	SABJE-1034161	BM 2066 EP	8491738	Pembelian	07/02/2005	20.918.400,00
970	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		tiger		200	-	MHISABJI69KO35219	SABJE4034116	BM 2070 EP	8491739	Pembelian	07/02/2005	20.918.400,00
971	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3		tiger		200	-	MHIS4BJII5K035208	S4BJE-1034201	B 2067 A	D8491737	Pembelian	07/02/2005	20.918.400,00
972	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	4		tiger		200	-	MHKABJ115K035290	SABJE-4034180	BP 2068 A	D8491736	Pembelian	07/02/2005	20.918.400,00
973	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	5		tiger		200	-	MH1SABJ195K035229	SABJE-1034194	BM 2069 EP	8491740	Pembelian	07/02/2005	20.918.400,00
974	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.1	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	13		HINO MICROBUS	-	-	-	MJEFB2WGLBJE13210	W04DTNJ83210	BP 7090 A	H09675842	Pembelian	17/08/2011	785.400.000,00
975	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	40		Toyota Innova Toyota Inova	-	-	-	MHFXW426272102692	1TR-6454819	BP 72 A	N7523329	Pembelian	25/04/2007	211.070.200,00
976	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	41		Toyota Innova Toyota Inova	-	-	-	MHFXW42G572IO2539	1TR.6453138BP	BP 73 A	E-7523330	Pembelian	25/04/2007	211.070.200,00
977	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	42		Toyota Innova Toyota Inova	-	-	-	MHFXW42G852052342	1TR 6458753	BP 98 A	N7523335	Pembelian	25/04/2007	211.070.200,00
978	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.9	Mobil Unit Visual Mini (MUVIANI)	1		Mitsubishi Strada Toyota Inova	-	-	-	MHBJNK7406F037159	4056CJ0700	BP 8041 A	E No-7523318	Pembelian	17/04/2007	280.500.000,00
979	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.9	Mobil Unit Visual Mini (MUVIANI)	2		Mitsubishi Strada Toyota Inova	-	-	-	MMBJNK7406F37264	4D56CJ1201	BP 8042 A	E-7523319	Pembelian	17/04/2007	280.500.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
980	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.9	Mobil Unit Visual Mini (MUVIANI)	3		Toyota Pick Up Hilux Toyota Inova	-	-	-	MR04W126970005289	1TR-6410825	BP 8043 A	N7523320	Pembelian	17/04/2007	154.000.000,00
981	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.6	Mobil Tangki Air	2		Nissan X-Trait St	-	-	-	T30.450651	GR25.4508324	BP 1475 A	E-6709502	Pembelian	21/03/2007	299.878.667,00
982	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.6	Mobil Tangki Air	3		Nissan X-Trait St	-	-	-	T30-451091	QR25-4547384	BP 1155 A	N6710499	Pembelian	21/03/2007	299.878.667,00
983	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.6	Mobil Tangki Air	4		Nissan X-Trait St	-	-	-	T30-A51090	QR25-455082A	BP 1154 A	N6710500	Pembelian	05/03/2007	311.300.000,00
984	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.5	Sport Utility Vehicle (SUV)	2		Toyota	SUV	-	-	-	-	-	-	Pembelian	31/05/2023	588.800.000,00
985	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	85		Yamaha	All New Nmax ABS	-	-	-	-	-	-	Pembelian	11/12/2023	37.870.000,00
986	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.2	Jeep	7		Mobil Toyota	New FORTUNER	2.7 SRZ 4X2 A/T VIN 2016	-	MHFGX8GS0G0501551	2TRA164176	BP 1139 A	L- 11194778	Pembelian	23/05/2016	491.450.000,00
987	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.2	Jeep	8		Mobil Toyota	New FORTUNER	2.7 SRZ 4X2 A/T VIN 2016	-	MHFGX8GS2G0501311	2TRA150055	BP 1140 A	L-11194779	Pembelian	23/05/2016	491.450.000,00
988	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	122		Toyota	All New Kijang Innova	2.0 V A/T Bensin-Vin 2016	-	MHFGW8EM8G1003471	1TRA073196	BP 1531 A	L-11192475	Pembelian	23/05/2016	335.100.000,00
989	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	123		Toyota	All New Kijang Innova	2.0 V A/T Bensin-Vin 2016	-	MHFGW8EM8G1003869	1TRA081207	BP 1532 A	L03562752	Pembelian	23/05/2016	335.100.000,00
990	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	124		Toyota	All New Kijang Innova	2.0 V A/T Bensin-Vin 2016	-	MHFGW8EM2G1005863	1TRA112830	BP 1534 A	L-11192476	Pembelian	23/05/2016	335.100.000,00
991	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	125		Toyota	All New Kijang Innova	2.0 V A/T Bensin-Vin 2016	-	MHFGW8EM6G1002948	1TRA061857	BP 1629 A	L-11192474	Pembelian	23/05/2016	335.100.000,00
992	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	128		Mobil Toyota	All New Kijang Innova	2.0 Q A/T Bensin-Vin 2016	-	MHFAW8EM5G0203560	1TRA124421	BP 1535 A	L-11192477	Pembelian	25/05/2016	379.150.000,00
993	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.2	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	13		Karoseri Road Master G, Chasis Hino FB 130	-	-	-	MJEFB2WGLDJE13799	W04DTNJ83799	BP 7134 A	K-00548945	Pembelian	30/09/2013	591.666.667,00
994	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.1	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	14		Karoseri VVIP, Chasis Isuzu NQR 71 EC	-	-	-	MHCN1R71LDJ044061	B044061	BP 7135 A	K00548974	Pembelian	30/09/2013	850.000.000,00
995	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	15		Toyota	All New Camry 2.5V A/T		-	MR053AK50H4509595	2ARU398433	BP 1495 A	M-11504228	Pembelian	26/05/2017	565.400.000,00
996	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.2	Jeep	3		Jeep	Grand Cherokee Overland		-	1C4RJFG82FC829419	FC829419	BP 757 A	M-11504242	Pembelian	15/06/2017	1.719.850.000,00
997	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.1	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	19		Mitsubishi		3900 cc	-	MHMFE84PBAJ002017	4D34TF89649	BP 7508 A	H-06212007	Pembelian	13/05/2010	441.940.458,00
998	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	80		Yamaha All New Nmax 155 ABS	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	06/12/2021	34.830.000,00
999	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	81		Yamaha All New Nmax 155 ABS	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	06/12/2021	34.830.000,00
1000	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	82		Yamaha All New Nmax 155 ABS	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	06/12/2021	34.830.000,00
1001	Biro Umum	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	12		ISUZU	TBR 54 PICK UP TURBO	-	-	MHCTBR54FFK174000	E174000	BP 8046 A	L - 07296179	Pembelian	22/09/2015	248.600.000,00
1002	Biro Umum	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	14		ISUZU	TBR 54 PICK UP TURBO	-	-	MHCTBR54FFK174029	E174029	BP 8048 A	L - 07296180	Pembelian	22/09/2015	248.600.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1003	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.1	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	17		ISUZU	NQR 71 EC E2-4	-	-	MHCNR71LFJ069541	B069541	BP 7037 A	L - 07296126	Pembelian	08/07/2015	905.000.000,00
1004	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.2	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	15		Isuzu	NQR 71 EC	-	-	MHCN1R71LFJ069542	B069542	BP 7034 A	L-07296123	Pembelian	08/07/2015	736.450.000,00
1005	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.2	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	16		Isuzu	NQR 71 EC	-	-	MGCN1R71LFJ069543	B069543	BP 7035 A	L-07296124	Pembelian	08/07/2015	736.450.000,00
1006	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.2	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	17		Isuzu	NQR 71 EC	-	-	MHCNR71LFJ069544	E069544	BP 7038 A	L - 07296127	Pembelian	08/07/2015	736.450.000,00
1007	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	89		ISUZU	NKR 55 LWB	-	-	MHCNR71LFJ064583	M064583	BP 7036 A	L - 07296125	Pembelian	08/07/2015	535.000.000,00
1008	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.2	Jeep	6		TOYOTA	Fortuner 2.5 G A / T TRD	-	-	MHF2R69G3F3138479	2KDS591884	BP 1795 A	L-11191561	Pembelian	30/11/2015	453.300.000,00
1009	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	43		New Camry 3.5 Q AT	-	-	-	MR053KK40C9002507	2GR0821472	BP 555	J-00056056	Pembelian	13/01/2012	677.930.000,00
1010	Biro Umum	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	6		Isuzu TBR 54 Turbo	-	-	-	MHCTBR54BBK159896	E159896	BP 8797 A	I07217149	Pembelian	28/07/2011	141.900.000,00
1011	Biro Umum	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	7		ISUZU TBR 54 TURBO	-	-	-	MHCTBR54BBK159895	E159895	BP 8798 A	I07217150	Pembelian	28/07/2011	141.900.000,00
1012	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	72		Suzuki Ertiga	-	-	-	MHYKZE81SEJ207792	K14BT1100837	BP 1457 A	K-06975806	Pembelian	17/02/2014	186.870.000,00
1013	Biro Umum	1.3.2.2.1.3.7	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1		Kaisar Triseda XP	-	-	-	MGDT15MKTDJ005113	162MJD1532706	BP 6042 A	K05884656	Pembelian	24/05/2013	23.288.500,00
1014	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	87		Type A - Karoseri	Isuzu	-	-	MHCN1R7LEJ05519	B055819	BP 7032 A	L - 03560392	Pembelian	17/02/2014	701.750.000,00
1015	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	88		Type A - Karoseri	Isuzu	-	-	MHCN1R7LEJ056452	B056452	BP 7028 A	L - 03560376	Pembelian	17/02/2014	701.750.000,00
1016	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	119		SUZUKI	ERTIGA GX AT VIN 2015	-	-	MHYKZE81SFJ250046	K14BT1153416	BP 1280 A	L03562756	Pembelian	26/03/2015	213.871.200,00
1017	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	120		SUZUKI	ERTIGA GX AT VIN 2015	-	-	MHYKZE81SFJ248597	K14BT1152077	BP 1281 A	L- 03562757	Pembelian	26/03/2015	213.871.200,00
1018	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	121		SUZUKI	ERTIGA GX AT VIN 2015	-	-	MHYKZE81SFJ250846	K14BT1153111	BP 1282 A	L03562761	Pembelian	26/03/2015	213.871.200,00
1019	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	6		HINO	HKMRJD3L/130MDL	-	-	MJEC1JG43F5125608	W04DTRR21204	BP 9109 A	L07290876	Pembelian	27/04/2015	1.290.850.000,00
1020	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.4	Mobil Pemadam Kebakaran	5		HINO	WU342R-HKMTJD3	-	-	MJEC1JG43F5124809	304DTRR20605	BP 9139 A	L- 07290934	Pembelian	27/04/2015	1.140.404.300,00
1021	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.4	Mobil Pemadam Kebakaran	6		HINO	WU342R-HKMTJD3	-	-	MJEC1JG43F5123206	WO4DTRR19362	BP 9140 A	L-07290935	Pembelian	27/04/2015	1.140.404.300,00
1022	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.4	Mobil Pemadam Kebakaran	7		HINO	WU342R-HKMTJD3	-	-	MJEC1JG43F5123205	W04DTRR19361	BP 9141 A	L07290936	Pembelian	27/04/2015	1.140.404.300,00
1023	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.1	Mobil Ambulance	1		Hyundai / Starek 2.5	Diesel M/T	-	-	MHXMF31JLFJ000798	D4CBE609036	BP 8138 A	L-07290519	Pembelian	07/05/2015	683.100.000,00
1024	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.1	Mobil Ambulance	2		Hyundai / Starex 2.5	Diesel M/T	-	-	MHXMF31JLFJ000794	D4CBE609046	BP 8136 A	L-07290517	Pembelian	07/05/2015	683.100.000,00
1025	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.1	Mobil Ambulance	3		Hyundai / Starex 2.5	Diesel M/T	-	-	MHXMF31JLFJ000805	D4CBE609063	BP 8137 A	L-07290518	Pembelian	07/05/2015	683.100.000,00
1026	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	78		Ford	Tiitanium 2.02 AT	-	-	MPB2XXMXB2EP83167	MGDBEP83167	BP 1300 A	L- 03563380	Pembelian	07/05/2015	583.500.000,00
1027	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.6	Mobil Tangki Air	11		HINO	JF8JJ1D-BGJ	-	-	MJEFG8JJ1FJB10097	J08EUGJ49021	BP 9142 A	L-07290937	Pembelian	07/05/2015	1.452.000.000,00
1028	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	76		KAWASAKI	Z250SL	-	-	MH4BR250EEJP01589	BX250AEA07970	BP 6200 A	L- 10606815	Pembelian	20/05/2015	79.475.000,00
1029	Biro Umum	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	77		KAWASAKI	Z250SL	-	-	MH4BR250EEJP01543	BX250AEA07979	BP 6201 A	L- 10606816	Pembelian	20/05/2015	79.475.000,00
1030	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.2	Jeep	9		Mitsubishi Pajero	PS 2.4L DU4X28 AT	-	-	MK2KRWFNUKJ001219	4N15UGC5131	BP 165 A	P 01951644	Pembelian	07/12/2020	563.000.000,00
1031	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	96		Toyota	Kijang Innova G A/T	1998	-	MHFXW42G562071968	1TR-6289344	BP 1327 A	E-0739580	Pembelian	16/07/2005	225.900.000,00
1032	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	97		Toyota	Innova G	1998	-	MHFXW42G3C2241515	F4051D319319	BP 1620 A	J-04373686	Pembelian	04/12/2012	235.950.000,00
1033	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	95		Honda	CR-V RM3 2WD 2.4 AT Warna Putih Metalik	2354 cc	-	MHRRM38500J343751	K24Z99409979	BP 1572 A	L-06137876	Pembelian	31/07/2013	424.900.000,00
1034	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	84		Kijang innova	-	-	-	MHFXW42G462072626	1TR-6293059	BP 93 A	E-0739586	Pembelian	21/03/2005	188.090.909,00
1035	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	94		Kijang innova	-	-	-	MHFXW42G962074405	1TR 6303625	BP 1501 A	N0739562	Pembelian	21/03/2005	188.090.909,00
1036	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	95		Kijang innova	-	-	-	MHFXW42G162073958	1TR-6301931	BP 1130 A	E-0739563	Pembelian	21/03/2005	188.090.909,00
1037	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	96		Kijang innova	-	-	-	MHFXW42G962069219	1TR 6272704	BP 1642 A	739564	Pembelian	21/03/2005	188.090.909,00
1038	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	97		Kijang innova	-	-	-	MHFXW42G852052321	1TR-6287891	BP 53 A	E0739565	Pembelian	21/03/2005	188.090.909,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1039	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	98		Kijang	Innova	1998	-	MHFXW42G362074125	1TR-6302305	BP 1167 A	E-0739566	Pembelian	21/03/2005	188.090.909,00
1040	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	99		Kijang innova	-	-	-	'MHFXW42G162069537	'1TR 6274756	BP 1641 A	N07399567	Pembelian	21/03/2005	188.090.909,00
1041	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	100		Kijang innova	-	-	-	MHFXW42G362069295	1TR 6273270	BP 1802 A	N0739570	Pembelian	21/03/2005	188.090.909,00
1042	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	103		Kijang innova	-	-	-	MHFXW42G852052329	1TR 6271123	BP 62 A	739569	Pembelian	21/03/2005	188.090.909,00
1043	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	75		Camry	3.5 Q AT	3500	-	MR053KK40A9002231	2GR0738150	BP 1286 A	H-00207199	Pembelian	02/06/2010	652.344.158,00
1044	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.1	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	16		Mitsubishi		3900 cc	-	MHMFE84PBAJ002138	4D34TF92615	BP 9183 A	H06212005	Pembelian	13/05/2010	441.940.458,00
1045	Biro Umum	1.3.2.2.1.2.2	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	14		Nissan Serena HW Star AT	-	-	-	C24-A26665	QR20-724626A	BP 1185 A	H-01746784	Pembelian	22/04/2010	376.148.224,00
1046	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	105		Toyota Avanza 1500 S AT	-	-	-	MHFM1CB41AK011588	DBT1436	BP 1187 A	H-00208113	Pembelian	10/05/2010	191.977.155,00
1047	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	106		Toyota Avanza 1500 S AT	-	-	-	MHFM1CB4JAK011436	DBS9139	BP 1183 A	H-00208114	Pembelian	10/05/2010	191.977.155,00
1048	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	107		Toyota Avanza 1500 S AT	-	-	-	MHFM1CB4JAK011531	DBS0770	BP 1182 A	H00208116	Pembelian	10/05/2010	191.977.155,00
1049	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	108		Toyota Avanza 1500 S AT	-	-	-	MHFM1CB4JAK011514	DBT0753	BP 1176 A	H00208112	Pembelian	10/05/2010	191.977.155,00
1050	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	4		Mitsubishi	FE 84G BC	3900 cc	-	MHMFE84PBAJ002018	4D34TF89650	BP 7509 A	H06212008	Pembelian	07/06/2010	481.944.968,00
1051	Biro Umum	1.3.2.2.1.6.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	5		-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	25/06/2010	206.547.843,00
1052	Biro Umum	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	77		Toyota Camry	3.5 Q AT	-	-	MR 053KK40A9002233	2GR 0735960	BP 1162 A	H-0 0207200	Pembelian	24/05/2010	681.819.213,00
1053	Biro Perekonomian Dan Pembangunan	1.3.2.2.1.4.6	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1		Honda	Revo CW F1 Green Black dan Honda Revo CW F1	110 CC	-	MH1JBK319EK016721	JBK3E1016878	BP 2501 A	L-10616375	Pembelian	24/10/2014	14.302.000,00
1054	Biro Perekonomian Dan Pembangunan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3		Honda	Vario Techno 125 CBS	125 CC	-	MH1JFK113EKO33909	JFK1E1033576	BP 2168 A	L-03552627	Pembelian	05/10/2017	19.442.000,00
1055	Biro Perekonomian Dan Pembangunan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	3		Toyota	Innova 2.0V A/T	2000 CC	-	MHFGW8EM1H1013356	1TRA287519	BP 1525 A	M-11504229	Pembelian	26/05/2017	340.700.000,00
1056	Biro Perekonomian Dan Pembangunan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		Yamaha	Vega ZR	114 CC	-	MH35D9204BJ467315	5D91466359	BP 4808 A	I-11554029	Pembelian	06/03/2012	12.846.000,00
1057	Biro Perekonomian Dan Pembangunan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		Yamaha	Vega ZR	114 CC	-	MH35D9204BJ467317	5D91466512	BP 4807 A	I-11554030	Pembelian	06/03/2012	12.846.000,00
1058	Biro Perekonomian Dan Pembangunan	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	1		Suzuki	Ertiga GL AT	1500 CC	-	MHYKZE81SEJ207588	K14BT1108875	BP 1450 A	K-06975802	Pembelian	17/02/2014	186.870.000,00
1059	Biro Perekonomian Dan Pembangunan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	2		Kijang	Innova	2000 CC	-	MHFXW42G852052301	1TR-6174905	BP 1691 A	D - 7779819	Pembelian	21/03/2005	188.090.909,00
1060	Biro Adminitrasi Kesejahteraan Rakyat	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	4		Suzuki	Ertiga GL AT NIK	1400	-	MHYKZE81SEJ206079	K14BT1113358	BP 1465 A	K-06975911	Pembelian	11/03/2014	185.430.000,00
1061	Biro Adminitrasi Kesejahteraan Rakyat	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	2		Suzuki	Ertiga GL AT NIK	1400	-	MHYKZE81SEJ207217	K14BT1107777	BP 1451 A	K-06975803	Pembelian	17/02/2014	186.870.000,00
1062	Biro Adminitrasi Kesejahteraan Rakyat	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	1		Toyota	Kijang Innova	1998	-	MHFXW42G052016262	1 TR-6030072	BP 1872 A/BP 19 A	D2645970	Pembelian	15/06/2004	225.900.000,00
1063	Biro Adminitrasi Kesejahteraan Rakyat	1.3.2.2.1.1.4	Multi Purpose Vehicle (MPV)	1		Toyota Innova Zenix	MAGA10R-BRXMBD 2.0 V CVT	2000 CC	-	MHFAAAAA5N0001090	M20ANA03321	BP 66 A	S 00454835	Pembelian	13/02/2023	449.800.000,00
1064	Biro Adminitrasi Kesejahteraan Rakyat	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	3		Suzuki	Ertiga 1.4 RAC DX AT	1400	-	MHYKZE81SEJ203962	K14BT1111128	BP 1452 A	K-06975804	Pembelian	02/05/2014	185.430.000,00
1065	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	1		Isuzu	D Max 2.4 MT WD	1800 CC	-	MP4TES77H6H-571645	368383	BP 8002 A	N316582	Pembelian	23/02/2006	259.375.565,00
1066	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2		Toyota	Avanza	1498cc/1500cc	-	MHFM1CB4JBK015455	DCB9904	BP 1581	H09675628	Pembelian	12/07/2011	190.000.000,00
1067	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.6.6	Mobil Tangki Air	1		HINO	110HP	4009	-	MJEC1JG41C5067993	WO4DTPJ34107	BP 8401 A	J-04368595	Pembelian	13/11/2012	349.910.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1068	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.6.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	1		TOYOTA	HILUX 2.5 V DC 4X4 AT	2494cc/2500cc	-	MROFR29G2E1031924	2KDA490900	BP 8207 A	K-06999713	Pembelian	01/09/2014	371.000.000,00
1069	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.6.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	2		TOYOTA	HILUX PU 2.0 CC MT	2000cc	-	MR0AW12G5E0045835	1TR7808992	BP 8127 A	L-03560318	Pembelian	17/11/2014	180.000.000,00
1070	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		HONDA	VARIO CBS IDLING STOP	125cc	-	MH1JFF111DK011560	JFF1E1017439	BP 2301 A	K05867386	Pembelian	10/06/2013	17.050.000,00
1071	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		HONDA	VARIO CBS IDLING STOP	125cc	-	MH1JFF111DK014748	JFF1E1011190	BP 2305 A	K05867391	Pembelian	10/06/2013	17.050.000,00
1072	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3		HONDA	VARIO CBS IDLING STOP	125cc	-	MH1JFF115DK023940	JFF1E1025790	BP 2302 A	K05867387	Pembelian	10/06/2013	17.050.000,00
1073	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	4		HONDA	VARIO CBS IDLING STOP	125cc	-	MH1JFF112DK014225	JFF1E1011298	BP 2306 A	K05867393	Pembelian	10/06/2013	17.050.000,00
1074	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4		Toyota	Fortuner 2,7 SRZ 4x2 A/T	2694cc	-	MHFGX8GS5J0505408	2TR-A560533	BP 1832 A	N-09119404	Pembelian	10/06/2019	532.000.000,00
1075	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	2		Mitsubishi	CR 2.5 ADC M/T (Diuble Cabin)	2500 cc	-	MMBJNKB40CDOT4438	4D5GUCDA5258	BP 8115 A	I-06659252	Pembelian	30/05/2011	409.530.000,00
1076	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	3		Mitsubishi	Strada CR 2.8 A SC GLX (4x4) M/T/Pick UP	2500 cc	-	MMBENKB70CD008207	4M4OUAC6557	BP 8114 A	I-06659253	Pembelian	30/05/2011	197.780.000,00
1077	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.3.1	Truck + Attachment	1		Hino	Ligh Truk/WU342R-HKMT JD3/130HD	2500 cc	-	MJEC1JG43B50-36809	WO4DTRJ-40471	BP 9107 A	I-06659255	Pembelian	30/05/2011	369.600.000,00
1078	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.3.1	Truck + Attachment	2		Hino	Ligh Truk/WU342R-HKMT JD3/130HD	2500 cc	-	MJEC1JG43B50-36807	W04DTJRJ-40469	BP 9106 A	I-06659254	Pembelian	30/05/2011	396.220.000,00
1079	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	2		Toyota Rush	Toyota Rush 1,5 S A/T GR Sport	1500 cc	-	MHKE8FB3JNK065230	2NRG785327	BP 1087 AA	R02863538	Pembelian	29/03/2022	289.500.000,00
1080	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	3		Toyota Rush	Toyota Rush 1,5 S A/T GR Sport	1500 cc	-	MHKE8FB3JNK065325	2NRG6789297	BP 1086 AA	R02863537	Pembelian	29/03/2022	289.500.000,00
1081	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	4		Toyota	Toyota Hilux Single Cabin	2000	-	MR0CW8BB6N0046689	1TRA998623	BP 8290 A	S 00434977	Pembelian	17/10/2022	344.539.000,00
1082	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.3.7	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	2		HINO	Hino Dutro 436 HD Tangki	4009 cc	-	MJECCB2F9N5004712	N04CWYJ14126	BP 8397 A	S-00425370	Pembelian	08/10/2022	530.300.000,00
1083	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	10		Yamaha	Yamaha gear	125	-	MH3SEG720NJ060131	E32XE-0085335	BP 4571 A	S-00455269	Pembelian	15/12/2022	20.214.250,00
1084	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	11		Honda	Honda CRF 150	150	-	MHD1KD1116NK331990	KD11E131312	BP 2102 XX	-	Pembelian	22/11/2022	33.457.000,00
1085	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	12		Honda	Honda CRF 150 Trail	150 cc	-	MHD1KD1118NK331943	KD11E1331269	BP 2103 XX	-	Pembelian	22/11/2022	33.457.000,00
1086	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	13		Honda	CRF 150L MMC-Extreme Red	150 cc	-	MH1KD1112NK324230	KD11E1323564	BP 2801 A	S-04158890	Pembelian	03/04/2023	33.457.000,00
1087	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	5		Yamaha	Byson	150cc	-	MH345P002CK102355	45P112400	BP 4804 A	I10021143	Pembelian	13/04/2012	21.978.000,00
1088	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	6		Yamaha	Byson	150cc	-	MH345P002CK102357	45P112395	BP 4801 A	I10021146	Pembelian	13/04/2012	21.978.000,00
1089	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	7		Yamaha	Byson	150cc	-	MH345P002CK102353	45P112392	BP 4803 A	I10021144	Pembelian	13/04/2012	21.978.000,00
1090	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	8		Honda	Revo	110cc	-	MH1JBD111BK011166	JBD1E1010890	BP 2024	I04194172	Pembelian	13/07/2011	17.818.750,00
1091	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	9		Honda	Mega Pro	150cc	-	MH1KC3118BK112829	KC31E1112857	BP 2025	I04194173	Pembelian	13/07/2011	22.387.500,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1092	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.4.6	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1		YAMAHA	VIXION	150cc	-	MH31PA004EK798882	1DA800134	BP 4108 A	L07277297	Pembelian	17/11/2014	24.469.000,00
1093	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.4.6	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	2		YAMAHA	VIXION	150cc	-	MH31PA004EK800212	1DA800313	BP 4109 A	L07277298	Pembelian	07/02/2014	24.469.000,00
1094	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.4.6	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	3		YAMAHA	VIXION	150cc	-	MH31PA004EK798437	1PA798693	BP 4120 A	L- 07277299	Pembelian	17/11/2014	24.469.000,00
1095	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3		Suzuki	New Ertiga Dreza GS AT 2017	1500 CC	-	MHYKZE81SHJ32496	K14BT1263516	BP 1742 A	N09128101	Pembelian	28/08/2018	237.400.000,00
1096	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.2.5	kendaraan bermotor penumpang lainnya (dst)	1		Toyota Hillux	Double Cabin 2.4 4x4 AT. DSL A/T EURO 4	2400 CC	-	MR0BB3CD9P5801866	2GD5380529	BP 8279 A	S-00469500	Pembelian	11/04/2023	497.400.000,00
1097	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	1		Toyota	Kijang innova	1998cc/2000cc	-	MHFXW42G062069139	1TR 6272292	BP 1745 A	N09089041	Pembelian	21/03/2005	188.090.909,00
1098	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	6		HONDA	VARIO CBS ISS	125	-	MH1JM5123NK123037	JM51E2127833	BP 2923 A	R 02864025	Pembelian	28/04/2022	21.695.000,00
1099	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	7		HONDA	VARIO CBS ISS	125	-	MH1JM5120NK129982	JM51E2128183	BP 2924 A	R 02864026	Pembelian	28/04/2022	21.695.000,00
1100	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	8		HONDA	Vario A1F02N37M1 A/T	125 cc	-	MH1JM5120NK129030	JM51E2127827	BP 2925 A	R 02864028	Pembelian	28/04/2022	21.695.000,00
1101	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	9		HONDA	VARIO CBS ISS / A1F02N37M1 A/T	125 cc	-	MH1JM5122NK129028	JM51E2127825	BP 2926 A	R 02864027	Pembelian	28/04/2022	21.695.000,00
1102	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.3.2.2.1.2.1	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	1		TOYOTA FORTUNER	2.7 V A/T	2700 CC	-	MHFYX59G6E8063418	2TR7845307	BP1419 A	K-06999712	Pembelian	01/09/2014	495.850.000,00
1103	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		INNOVA	G AT	2000 CC	-	mhfxw42g152016836	itr 6037345	BM 29 HQ/BP 1252 A	D2645974D	Pembelian	03/06/2004	225.900.000,00
1104	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		HONDA	VARIO CBS IDLING STOP	125 cc	-	MH1JFF112DK007548	JFF1E1006504	BP 2304 A	K058677389	Pembelian	10/06/2013	17.050.000,00
1105	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		HONDA	VARIO CBS IDLING STOP	125 cc	-	MH1JFF11XDK011587	JFF1E1010681	BP 2303 A	K-05867388	Pembelian	10/06/2013	17.050.000,00
1106	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3		Yamaha	Byson	150 CC	-	MH345P002CK102357	45P112395	BP 4802 A	I-10021146	Pembelian	13/04/2012	21.978.000,00
1107	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	4		Honda	Revo	110 CC	-	MH1JBD110BK011157	JBD1E1010883	BP 2026 A	I-04194174	Pembelian	13/07/2011	17.818.750,00
1108	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	5		HONDA	SCOOPY	110 cc	-	MHIKCA4111DK063532	KCA41E1063194	BP 3480 A	K-05889022	Pembelian	19/09/2018	18.165.395,00
1109	Dinas Perhubungan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		HONDA	VARIO	125 CC	-	MH1JFC116CK130511	JFC1E1132584	BP 3252 A	j 05573042	Pembelian	25/09/2012	15.230.000,00
1110	Dinas Perhubungan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		HONDA	VARIO	125 CC	-	MH1JFC117CK130517	JFC1E1132520	BP 3253 A	j05573041	Pembelian	25/09/2012	15.230.000,00
1111	Dinas Perhubungan	1.3.2.2.1.4.6	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1		SUZUKI	THUNDER	160 CC	-	MH8EN125A9J-607769	F405-ID-607532	BP 4036 A/BP 6401 A	F 8197466	Pembelian	28/12/2009	21.450.000,00
1112	Dinas Perhubungan	1.3.2.2.1.4.6	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	2		SUZUKI	THUNDER	160 CC	-	MH8EN125A9J-607816	F405-ID-608047	BP 4035 A/BP 6402 A	F 8197465	Pembelian	28/12/2009	21.450.000,00
1113	Dinas Perhubungan	1.3.2.2.1.6.3	Mobil Unit Penerangan Darat	1		Suzuki	Grand Vitara 2.4 MT NIK	2400 CC	-	JSAJTEA4VE4100191	J24B1266179	BP 1478 A/BP 99 AP	L-03560093	Pembelian	05/05/2014	330.010.000,00
1114	Dinas Perhubungan	1.3.2.2.1.4.6	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	5		HONDA	VARIO CBS	160 CC	-	MH1KF4114KK819567	KF41E1822048	BP 3407 A	P 01918161	Pembelian	24/12/2019	22.500.000,00
1115	Dinas Perhubungan	1.3.2.2.1.4.6	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	6		HONDA	Vario CBS	160 CC	-	MH1KF4111K819557	KF41E1822036	BP 3409 A	P 01918162	Pembelian	24/12/2019	22.500.000,00
1116	Dinas Perhubungan	1.3.2.2.1.4.6	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	3		HONDA	TIGER	150 CC	-	MH1MC11148KK032532	MC11E1031250	BP 2048 A	F 2664806	Pembelian	29/12/2008	19.579.725,00
1117	Dinas Perhubungan	1.3.2.2.1.4.6	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	4		HONDA	TIGER	150 CC	-	MH1MC11118K031869	MC11E1032406	BP 2052 A	F 2664805	Pembelian	29/12/2008	19.579.725,00
1118	Dinas Perhubungan	1.3.2.2.1.3.7	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1		TOYOTA	HILUX	2500 cc	-	MROFR22G6FO 798231	2 KD U 757171	BP 8038 A	L-03563455	Pembelian	29/04/2015	356.100.000,00
1119	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	9		Avanza	Brand New 1.3	1329	-	MHKM5ED2JHK005543	1NRF317234	BP 1656 A	M-11506721	Pembelian	14/06/2017	199.000.000,00
1120	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2		Kijang Inova	G / AT	2000 CC	-	-	-	BM 28 HQ	-	Pembelian	31/12/2004	225.900.000,00
1121	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3		ISUZU TBR 54		-	-	MHCTBR54B5K127293	E127293	BP104A	9746856	Pembelian	31/12/2006	204.000.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1122	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4		KIJANG INNOVA V AT(HITAM METALIK)		-	-	MHFXW43GXB4059425	1TR7168413	BP1579A	H-09675626	Pembelian	31/12/2011	316.700.000,00
1123	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	5		INNOVA AUTOMATIC		-	-	MHFXW43G4D4079253	ITR7581605	BP1530A	K-022522178	Pembelian	31/12/2013	296.250.000,00
1124	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6		TOYOTA AVANZA AUTOMATIC		-	-	MHKM1BB3DK012252	MA91443	BP1375A	K-02512127	Pembelian	31/12/2013	176.150.000,00
1125	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	8		TOYOTA	RUSH	-	-	MHFE2CK3JEK026883	DEJ4589	BP1405A	K-06975702	Pembelian	31/12/2014	232.425.000,00
1126	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.6.1	Mobil Ambulance	1		-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	31/12/2008	370.837.500,00
1127	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.6.1	Mobil Ambulance	2		-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	31/12/2008	370.837.500,00
1128	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.6.1	Mobil Ambulance	3		Volkswagen	PNLVANTRANS	-	-	MKTPB27EHEK000098	CAA503667	BP1520A	K-06998259	Pembelian	31/12/2014	599.500.000,00
1129	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.6.1	Mobil Ambulance	4		AKINDO	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	31/12/2014	101.200.000,00
1130	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	1		TOYOTA HILUX	HILUX 2,0 M/T	-	-	'MR04W11G1F2000530	1TR7937530	BP8057A	M-05173944	Pembelian	01/11/2015	200.000.000,00
1131	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	8		Sepeda Motor	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	30/09/2006	12.256.192,00
1132	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	9		Suzuki FD 125 XSD	FD 125 XSD	-	-	MH8FD125X5J	F403-ID	BP 2506 A	E-0736228	Pembelian	30/09/2006	12.256.192,00
1133	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	10		Suzuki FD 125 XSD	FD 125 XSD	-	-	MH8FD125X6J.736313	F403.ID.736624	BP 2507 A	E-0736248	Pembelian	30/09/2006	12.256.192,00
1134	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	11		Suzuki FD 125 XSD	FD 125 XSD	-	-	MH8FD125XGJ-728439	F403-ID-727991	BP 2508 A	E0736249	Pembelian	30/09/2006	12.256.192,00
1135	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	12		Suzuki FD 125 XSD	FD 125 XSD	-	-	MH8FD125XGJ-728073	F403-ID-727827	BP 2509 A	E-0736250	Pembelian	30/09/2006	12.256.192,00
1136	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	13		'Suzuki FD 125 XSD	FD 125 XSD	-	-	MH8FD125XGJ-731564	F403-ID-732120	'BP 2511 A	E-0736252	Pembelian	30/09/2006	12.256.192,00
1137	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	14		Suzuki FD 125 XSD	FD 125 XSD	-	-	MH8FD125X6J	F403-ID	BP 2512 A	E-0736247	Pembelian	30/09/2006	12.256.192,00
1138	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	15		Sepeda Motor	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	30/09/2006	12.256.192,00
1139	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		HONDA SUPRA X 125 RACING NF 125 TR	NF 125 TR	-	-	MH1JB9122BK725037	JB91E2715989	BP2584A	I-04194100	Pembelian	31/12/2011	15.396.000,00
1140	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3		HONDA SUPRA INJEKSI	NF 125 TRF	-	-	MH1JB01169K073391	JBO1E-1072177	BP2107A	F-3875332	Pembelian	31/12/2009	15.565.000,00
1141	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	4		HONDA SUPRA INJEKSI	NF125 TRF	-	-	MH1JB01149K071686	JB01E1070481	BP2108A	F-3875331	Pembelian	31/12/2009	15.565.000,00
1142	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	5		HONDA NF 125 TR MT	NF 125 TR MT	-	-	MH1JB9132DK228646	JB91E3214041	BP2311A	K-05873400	Pembelian	31/12/2013	15.680.000,00
1143	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	6		HONDA NF 125 TR MT	NF 125 TR MT	-	-	MH1JB9137DK281214	JB91E3266585	BP2312A	K-05873401	Pembelian	31/12/2013	15.680.000,00
1144	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	7		HONDA NF 125 TR MT	NF 125 TR MT	-	-	MH1JB9133DK281064	JB91E3266218	BP2313A	K-05873402	Pembelian	31/12/2013	15.680.000,00
1145	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.6	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1		HONDA	SUPRA FIT	-	-	MHIHB71158K463968	HB71E1461018	BP 2041 A	F-1780321	Pembelian	31/12/2008	15.174.250,00
1146	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.6	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	2		HONDA	MEGA PRO	-	-	MHIKC11108K150312	KC 11E-1152484	BP 2042 A	F-1780316	Pembelian	31/12/2008	23.825.750,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1147	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	11		Toyota Avanza G	MINIBUS	1298	Toyota	MHFM1B43J6K014966	DB77400	BP 1028 A	2824547	Hibah	19/04/2006	135.286.800,00
1148	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	12		DAIHATSU Xenia	MINIBUS	1298	Daihatsu	MHKVIBA2JKO15176	DC 58754	BP 1320 A	8031926	Hibah	10/07/2007	79.200.000,00
1149	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	13		TOYOTA INNOVA 2.0 G AT	2.0 G AT	1998 CC	-	MHFJW8EMOM2393395	1TRA913716	BP 25 A	Q08860394	Pembelian	17/11/2021	326.300.000,00
1150	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	2		FORD	RANGER	2499	-	NIN885FE409W836517	WLAT1136775	B 9918 WQ	G-1964985	Hibah	10/12/2009	479.564.800,00
1151	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	3		MITSUBISHI	STRADA DOUBLE CABIN	-	-	MMBJNKB408D092946	4D56UCBF5977	B 9580 WQ	-	Hibah	05/11/2008	280.419.571,00
1152	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	34		HONDA	AFX12U21C08 M/T	125	-	#NAME?	#NAME?	-BP 3263 A	S-425057	Pembelian	06/06/2022	19.256.000,00
1153	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	16		Suzuki FD 125 XSD	FD 125 XSD	-	-	MH8FD125X5J	F403-ID	'BP 2514 A	E-0736226	Pembelian	30/09/2006	12.256.192,00
1154	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	17		Suzuki FD 125 XSD	FD 125 XSD	-	-	MH8FD125X5J	F403-ID	BP 2515 A	E-0736227	Pembelian	30/09/2006	12.256.192,00
1155	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	18		Suzuki FD 125 XSD	FD 125 XSD	-	-	MH8FD125X6J	F403-ID	BP 2516 A	E-0736229	Pembelian	30/09/2006	12.256.192,00
1156	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	19		Suzuki FD 125 XSD	FD 125 XSD	-	-	MH8FD125X6J	F403-ID	BP 2517 A	E-0736231	Pembelian	30/09/2006	12.256.192,00
1157	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	20		Suzuki FD 125 XSD	FD 125 XSD	-	-	MH8FD125X6J	F403-ID	BP 2518 A	E-0736232	Pembelian	30/09/2006	12.256.192,00
1158	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	21		Suzuki FD 125 XSD	FD 125 XSD	-	-	MH8FD125X6J	F403-ID	BP 2519 A	E-0736233	Pembelian	30/09/2006	12.256.192,00
1159	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	22		'Suzuki FD 125 XSD	FD 125 XSD	-	-	MH8FD125XGJ-760749	F403-ID-760988	BP 2520 A	E-0736234	Pembelian	30/09/2006	12.256.192,00
1160	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	23		Suzuki FD 125 XSD	FD 125 XSD	-	-	MH8FD125XGJ-760779	F403-ID-761008	BP 2521 A	E-0736235	Pembelian	30/09/2006	12.256.192,00
1161	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	24		SUZUKI/ FD 125 XSD	/FD 125 XSD	-	-	MH8FD425X6J.760776	F403.ID.760970	BP 2522 A	E-0736236	Pembelian	30/09/2006	12.256.192,00
1162	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	27		Suzuki FD 125 XSD	FD 125 XSD	-	-	MH8FD125XGJ-760771	F403-ID-760982	BP 2525 A	E0736239	Pembelian	30/09/2006	12.256.192,00
1163	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	29		Sepeda Motor	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	30/09/2006	12.256.192,00
1164	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	30		Sepeda Motor	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	30/09/2006	12.256.192,00
1165	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	31		Suzuki	FD 125 XSD	-	-	MH8FD125X6J	F403-ID	BP 2529 A	0 736243	Pembelian	30/09/2006	12.256.192,00
1166	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	32		Suzuki FD 125 XSD	FD 125 XSD	-	-	MH8FD125XGJ-759887	F403-ID-760078	BP 2530 A	E0736244	Pembelian	30/09/2006	12.256.192,00
1167	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	33		Suzuki FD 125 XSD	FD 125 XSD	-	-	MH8FD125XGJ-759318	F403-ID-759499	BP 2531 A	E0736245	Pembelian	30/09/2006	12.256.192,00
1168	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.6.18	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	1		Mobil Puskesmas keliling	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	30/09/2006	287.534.944,00
1169	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri Tanjung Uban	1.3.2.2.1.6.2	Mobil Jenazah	1		TOYOTA	INNOVA 2.0 G M/T	1998 CC	-	MHFJW8EM7L2383638	1TRA759806	BP 7218 A	P01952217	Pembelian	28/12/2020	441.650.000,00
1170	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri Tanjung Uban	1.3.2.2.1.6.1	Mobil Ambulance	4		MITSUBISHI	L300	2477	-	MHML0WY397K000944	4D56C-CB7397	BP 7150 A	8031056	Pembelian	09/11/2010	126.143.600,00
1171	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	12		HONDA	GL 160	160 CC	-	MHIKC11108K150312	KC 11E-1152484	BP 2042 A	F-1780316	Pembelian	07/10/2008	11.330.000,00
1172	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	13		HONDA	GL 160	100 CC	-	MH1HB71158K463968	HB71E1461018	BP 2041 A	F-1780321	Pembelian	17/06/2008	7.370.000,00
1173	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri Tanjung Uban	1.3.2.2.1.6.1	Mobil Ambulance	3		TOYOTA	HIACE MT	2494 CC	-	JTFSS22P8J0177512	2KDA975501	BP 7217 A	9128050	Pembelian	02/11/2018	717.700.000,00
1174	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri Tanjung Uban	1.3.2.2.1.6.1	Mobil Ambulance	5		ISUZU	NHR 55 AMBULANCE	2771 CC	-	M018008	MHCNH55EY7J018008	BP 7020 A	E NO 3926785 D	Hibah	31/12/2007	313.800.000,00
1175	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri Tanjung Uban	1.3.2.2.1.6.2	Mobil Jenazah	2		TOYOTA	J2462651	2000 CC	-	MJJSD21127KO	J2462651	BP 7151 A	E NO 8031056 D	Hibah	31/12/2007	218.750.000,00
1176	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri Tanjung Uban	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	11		HONDA	NEW SPACY CW HELM INJECTION	108 cc	-	MH1JFA11XEK216461	JFA1E1211485	BP 3988 A	M 05181033	Pembelian	15/07/2014	13.831.000,00
1177	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri Tanjung Uban	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	1		Toyota	HILUX Single Cabin	2000 CC	-	MR0AW126390018199	ITR-6767168	BP 8054 B	F-8196910	Pembelian	31/12/2009	189.200.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1178	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri Tanjung Uban	1.3.2.2.1.6.1	Mobil Ambulance	1		Toyota	Hi ace comutter	2494 CC	-	JTFSS22P3C0115499	2KD5902623	BP 8469 A	K 05756161	Pembelian	03/09/2013	370.700.000,00
1179	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri Tanjung Uban	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		Honda	Tiger CW GL 200 R	196 CC	-	MH1MC2313DK062229	MC23E1061704	BP 2074 A	K 01302015	Pembelian	30/05/2013	24.672.000,00
1180	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri Tanjung Uban	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3		Honda	Tiger CW GL 200 R	196 CC	-	MH1MC2313DK062361	MC23E1061746	BP 2075 A	K 01302016	Pembelian	30/05/2013	24.672.000,00
1181	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri Tanjung Uban	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	4		Honda	Vario Techno	124 CC	-	MH1JFC111DK243946	JFC1E1242838	BP 2071 A	K 01302012	Pembelian	30/05/2013	15.921.000,00
1182	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri Tanjung Uban	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	5		Honda	Vario Techno	124 CC	-	MH1JFC115DK245554	JFC1E1247329	BP 2072 A	K 01302013	Pembelian	30/05/2013	15.921.000,00
1183	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri Tanjung Uban	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	6		Honda	vario techno125 CBS PG-F1NC12A1CBF	124 cc	-	MH1JFC112DK209157	JFC1E1206536	BP 2073 A	K 01302014	Pembelian	30/05/2013	15.921.000,00
1184	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri Tanjung Uban	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	7		Honda	TIGER CW GL 200 R	196 CC	-	MH1MC2311DK062200	MC23E1061365	BP 2076 A	K 01302017	Pembelian	04/06/2013	24.672.000,00
1185	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri Tanjung Uban	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	9		HONDA	NEW SPACY	108 CC	-	MH1JFA119EK216029	JFA1E1211096	BP 2215 A	L-11178241	Pembelian	15/07/2014	13.831.000,00
1186	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri Tanjung Uban	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	10		HONDA	NEW SPACY CW HELM INJECTION	108 CC	-	MH1JFA110EK216016	JFA1E1211090	BP 3989 A	M 05181034	Pembelian	15/07/2014	13.831.000,00
1187	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	1		TOYOTA	AVANZA 1,3 E A/T (HITAM METALIK)	1,3 E A/T	-	DJ26660	MHFMIBB2JBK001319	BP 1575 A	H-09675622	Hibah	31/12/2011	156.475.000,00
1188	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri Tanjungpinang	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	2		AVANZA E AT (SILVER METALIK)	TOYOTA AVANZA 1,3 E A/T	1,3 E A/T	-	DJ21619	MHFM1BB2JBK001331	BP 1576 A	H-09675623	Hibah	31/12/2011	156.475.000,00
1189	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri Tanjungpinang	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	3		AVANZA E AT (SILVER METALIK)	TOYOTA AVANZA 1,3 E A/T	1300 CC	-	MHFM1BB2JBK001320	DJ26783	BP 1577 A	H-09675624	Hibah	31/12/2011	156.475.000,00
1190	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	1		TOYOTA	AVANZA VELOZ 1.5 M/T	1500 CC	-	DDS3641	MHKM1CA4JDK043104	BP 1389 A	K-02522103	Pembelian	25/04/2013	177.550.000,00
1191	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	2		TOYOTA	AVANZA VELOZ 1.5 M/T	1500 CC	-	DDR3170	MHKM1CA4JDK041575	BP 1390 A	K-02522101	Pembelian	25/04/2013	177.550.000,00
1192	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	1		isuzu	TBR 54 TURBO	1500 CC	-	MHCTBR54BBK159821	E159821	BP 8112 A	I-06659256	Hibah	31/12/2011	162.250.000,00
1193	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	2		isuzu	TBR 54 TURBO	1500 CC	-	MHCTBR54BBK159827	E159827	BP 8113 A	I-06659266	Hibah	31/12/2011	162.250.000,00
1194	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri	1.3.2.2.1.6.1	Mobil Ambulance	1		TOYOTA	HIACE COMMUTER M/T	2982 cc	-	2KDA164272	JTFSS22P9D0127271	BP 7120 A	K-00548848	Pembelian	30/12/2013	464.200.000,00
1195	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri	1.3.2.2.1.6.1	Mobil Ambulance	2		KIA	TRAVELLO K 2700	2665 cc	-	J2572591	MJJSD2112BK005406	BP 8135 A	I-04615087	Hibah	31/12/2011	689.700.000,00
1196	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri	1.3.2.2.1.6.2	Mobil Jenazah	1		SUZUKI	APV ARENA	1500 CC	-	G15A1D233222	MHYGDN42VBJ357467	BP 1599 A	I-04615381 D	Hibah	31/12/2011	194.842.000,00
1197	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		Honda	Mega Pro HONDA GL15A1RR M/T	150 CC	-	KC31E1281175	MH1KC311XDK283214	BP 2350 A	K-05889033	Pembelian	05/06/2013	19.513.000,00
1198	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		Honda	Mega Pro HONDA GL15A1RR M/T	150 CC	-	KC31E1287294	MH1KC3111DK288544	BP 2351 A	K-05889032	Pembelian	05/06/2013	19.513.000,00
1199	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	4		SUZUKI	ALL NEW ERTIGA	1500 CC	-	MHYANC22SKJ119016	K15BT1098326	BP 1863 A	N-09142514	Pembelian	31/12/2019	264.000.000,00
1200	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	5		SUZUKI	ALL NEW ERTIGA	1500 CC	-	MHYANC22SKJ119205	K15BT1099685	BP 1862 A	N-09142513	Pembelian	31/12/2019	264.000.000,00
1201	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	8		Honda	Beat Sporty CBS	110 CC	-	MHIJM212XKK329830	JM21E2307150	BP 3921 A	P-01917830	Pembelian	31/12/2019	16.200.000,00
1202	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	9		Honda	Beat Sporty CBS	110 CC	-	MHIJM212XKK329499	JM21E2306915	BP 3923 A	P-01917831	Pembelian	31/12/2019	16.200.000,00
1203	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	10		Honda	Beat Sporty CBS	110 CC	-	MHIJM212XKK329882	JM21E2307235	BP 3920 A	P-01917829	Pembelian	31/12/2019	16.200.000,00
1204	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		suzuki	new ertiga ss	1500 CC	-	MHYANC22SLI102214	K15BT1139318	BP 1941 A	P-01951588	Pembelian	30/11/2020	264.000.000,00
1205	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2		toyota	new kijang innova	2400 CC	-	MHFAW8EM1L0215621	1TR A805516	BP 1939 A	P-01951623	Pembelian	08/12/2020	368.000.000,00
1206	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri	1.3.2.2.1.6.1	Mobil Ambulance	4		HYUNDAI	STRAREX MOVER	2500 CC	-	MHXMF31JLKJ001380	04CB762140	B 1870 SIX	P-08540503	Hibah	08/04/2020	517.266.667,67
1207	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri	1.3.2.2.1.6.1	Mobil Ambulance	5		ISUZU	NHR 55 CO F2-1	2771 CC	-	M056054	MHCNHR55FFJ056054	BP 7205 A	M-11536327	Hibah	06/05/2014	498.850.000,00
1208	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri	1.3.2.2.1.6.29	Mobil Tranfusi Darah	1		SUZUKI	APV GL INCLUDE KAROSERI	1500 CC	-	MHYGDN42VMJ00812	G15AID44014	BP 1053 A	Q-08868382	Hibah	24/09/2021	243.692.812,00
1209	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri	1.3.2.2.1.6.1	Mobil Ambulance	3		KIA	Travello	2665 cc	-	J2790036	KNCSHX71LJ7241646	BP 7056 A	N-09128110	Pembelian	23/05/2018	343.500.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1210	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3		HONDA	New Vario Techno 125 CBS ISS	125 CC	-	JFK1E1258962	MH1JFK11XEK257906	BP 2238 A	L-10616371	Pembelian	10/12/2014	17.346.000,00
1211	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	4		HONDA	New Vario Techno 125 CBS ISS	125 CC	-	JFK1E1258962	MH1JFK11XEK257906	BP 2239 A	L-10616372	Pembelian	10/12/2014	17.346.000,00
1212	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	5		HONDA	SUPRA X 125 RACING NF 125 TR	125 CC	-	JB91E2727171	MHIJB912XBK736013	BP 2564 A	I-04194097 D	Hibah	31/12/2011	15.396.000,00
1213	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri Tanjungpinang	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		KIJANG INNOVA V AUTOMATIC	V AUTOMATIC	2000	-	MHFXW43GXC4070216	1TY7381490	BP 1611 A	J-02150890	Hibah Dinas Kesehatan	13/11/2012	293.800.000,00
1214	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepri	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	6		HONDA	SUPRA X 125 RACING NF 125 TR	125 CC	-	JB91E276074	MHIJB9128BK725043	BP 2565 A	I-04194098 D	Hibah	31/12/2011	15.396.000,00
1215	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		TOYOTA	KIJANG INNOVA G AT	1998 CC	-	MHFXW42C842008974	ITR6018942	BP 23 A	D - 1788997	Pembelian	18/06/2004	225.900.000,00
1216	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.6.9	Mobil Unit Visual Mini (MUVIANI)	1		Guru		-	-	-	-	-	-	Pembelian	31/12/2007	338.446.000,00
1217	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	1		Toyota Rush	1.5 A/T TRD Sportivo	1500	-	MHFE2CK3JEK027162	DEJ6865	BP 1395 A	K-06675709	Pembelian	05/05/2014	232.425.000,00
1218	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	2		Toyota Rush	1.5 A/T TRD Sportivo	1500	-	MHFE2CK3JEK027142	DEJ6282	BP 1391 A	K-06975710	Pembelian	05/05/2014	232.425.000,00
1219	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	3		Toyota Rush	1.5 A/T TRD Sportivo	1500	-	MHFE2CK3JEK025286	DED6050	BP 1392 A	K-06975711	Pembelian	05/05/2014	232.425.000,00
1220	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	4		Toyota Rush	1.5 A/T TRD Sportivo	1500	-	MHFE2CK3JEK027111	DEJ2562	BP 1393 A	K-06975712	Pembelian	05/05/2014	232.425.000,00
1221	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	5		Toyota Rush	1.5 A/T TRD Sportivo	1500	-	MHFE2CK3JEK027083	DEJ5471	BP 1394 A	K-06975713	Pembelian	05/05/2014	232.425.000,00
1222	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	6		SUZUKI	ERTIGA	1373CC	-	MHYKZE81SEJ207392	K14BT1102607	BP 1458 A	K-06975835	Pembelian	16/05/2014	185.430.000,00
1223	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	7		SUZUKI	ERTIGA	1373CC	-	MHYKZE81SEJ22C538	KI4BT1123461	BP 1346 A	L-03560029	Pembelian	16/05/2014	174.530.000,00
1224	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.2.2	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1		Daihatsu Grand Max	Mikrobus	1500 CC	-	-	-	-	-	Pembelian	03/08/2009	149.699.000,00
1225	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		Supra Fit	Kenderaan Roda 2	100 CC	-	-	-	-	-	Pembelian	24/09/2007	94.149.000,00
1226	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	28		LEOPARD	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/06/2020	11.137.000,00
1227	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	29		APRICA	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/06/2020	22.694.100,00
1228	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	30		APRICA	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/06/2020	10.215.100,00
1229	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	31		APRICA	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/06/2020	10.215.100,00
1230	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	32		APRICA	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/06/2020	10.215.100,00
1231	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	33		APRICA	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/06/2020	10.215.100,00
1232	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	34		APRICA	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/06/2020	10.215.100,00
1233	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	35		APRICA	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/06/2020	10.215.100,00
1234	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	36		APRICA	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/06/2020	10.215.100,00
1235	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	37		APRICA	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/06/2020	10.215.100,00
1236	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	38		APRICA	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/06/2020	10.215.100,00
1237	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	39		APRICA	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/06/2020	10.215.100,00
1238	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	40		APRICA	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/06/2020	13.472.100,00
1239	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	41		APRICA	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/06/2020	13.472.100,00
1240	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	42		APRICA	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/06/2020	13.472.100,00
1241	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	43		APRICA	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/06/2020	13.472.100,00
1242	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	44		APRICA	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/06/2020	13.472.100,00
1243	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	45		BULLOCKS	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/06/2020	20.995.033,00
1244	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		EMARO	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	25/06/2020	41.202.903,00
1245	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3		EMARO	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	25/06/2020	41.202.903,00
1246	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	4		EMARO	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	25/06/2020	41.202.903,00
1247	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	5		EMARO	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	25/06/2020	41.202.905,00
1248	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	6		EMARO	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	25/06/2020	64.011.937,00
1249	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	7		EMARO	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	25/06/2020	25.226.872,00
1250	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	8		EMARO	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	25/06/2020	25.226.872,00
1251	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	9		EMARO	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	25/06/2020	25.226.872,00
1252	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	10		EMARO	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	25/06/2020	25.226.872,00
1253	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	11		EMARO	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	25/06/2020	22.235.422,00
1254	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	12		EMARO	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	25/06/2020	22.235.422,00
1255	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	13		EMARO	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	25/06/2020	22.235.422,00
1256	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	14		EMARO	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	25/06/2020	22.235.422,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1257	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	15		EMARO	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	25/06/2020	10.673.575,00
1258	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	16		EMARO	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	25/06/2020	10.673.575,00
1259	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	8		Toyota	Rush 1.5 G A/T	1496 CC	-	MHKE8FB2JKK008088	2NRF929167	BP 1920 A	P01949096	Pembelian	24/09/2020	259.000.000,00
1260	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.2.1	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	1		isuzu	NLR 55	-	-	-	-	-	-	Pembelian	31/12/2021	569.200.000,00
1261	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	57		HONDA VARIO	125 CBS	-	-	-	-	-	-	Pembelian	07/08/2023	22.980.000,00
1262	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	58		HONDA VARIO	125 CBS	-	-	-	-	-	-	Pembelian	07/08/2023	22.980.000,00
1263	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	59		HANDA VARIO	125 CBS	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/12/2023	21.980.000,00
1264	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.2.2	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	2		ISUZU	ELF	-	-	MHCNKR71HGJ075417	B075417	BP 7103 A	M-11509172	Pembelian	05/09/2017	774.510.000,00
1265	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.2.2	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	3		Hino	-	-	-	MHCNKR7HGJ075416	B075416	BP 7148 A	M-11509360	Pembelian	30/11/2017	671.550.000,00
1266	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	46		BULLOCKS	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/06/2020	20.995.033,00
1267	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	47		BULLOCKS	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/06/2020	20.995.033,00
1268	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	48		BULLOCKS	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/06/2020	20.995.033,00
1269	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	49		BULLOCKS	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/06/2020	20.995.033,00
1270	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	50		BULLOCKS	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/06/2020	20.995.035,00
1271	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	51		BULLOCKS	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/06/2020	19.880.166,00
1272	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	52		BULLOCKS	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/06/2020	19.880.166,00
1273	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	53		BULLOCKS	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/06/2020	19.880.166,00
1274	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	54		BULLOCKS	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/06/2020	19.880.166,00
1275	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	55		BULLOCKS	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/06/2020	19.880.166,00
1276	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	56		BULLOCKS	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/06/2020	19.880.170,00
1277	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	17		EMARO	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	25/06/2020	10.673.575,00
1278	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	18		EMARO	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	25/06/2020	10.673.575,00
1279	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	19		EMARO	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	25/06/2020	68.599.993,00
1280	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	20		EMARO	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	25/06/2020	68.599.993,00
1281	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	21		HONDA	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	27/06/2020	18.849.000,00
1282	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	22		HONDA	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	27/06/2020	18.849.000,00
1283	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	23		HONDA	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	27/06/2020	20.273.000,00
1284	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	24		HONDA	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	27/06/2020	20.273.000,00
1285	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	25		HONDA	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	27/06/2020	26.618.000,00
1286	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	26		HONDA	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	27/06/2020	32.030.000,00
1287	Dinas Pendidikan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	27		HONDA	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	27/06/2020	32.466.000,00
1288	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batam	1.3.2.2.1.3.7	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1		Viar	New Karya 150RL	-	-	-	-	-	-	Pembelian	04/05/2023	37.570.000,00
1289	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Batam	1.3.2.2.1.6.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	1		-	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2012	20.265.000,00
1290	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Batam	1.3.2.2.1.6.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	2		-	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2012	25.735.000,00
1291	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Batam	1.3.2.2.1.6.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	3		-	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2012	25.593.000,00
1292	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Batam	1.3.2.2.1.6.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	4		-	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2012	29.548.000,00
1293	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Batam	1.3.2.2.1.6.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	5		-	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2012	40.738.180,00
1294	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Batam	1.3.2.2.1.6.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	6		-	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2012	55.300.500,00
1295	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Batam	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		Toyota	Kijang Innova	-	-	MHEJW8EM8J2360351	1TRA536635	BP 1864 AR	Q-08887379	Pembelian	31/12/2021	343.038.800,00
1296	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Batam	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	1		Mitsubishi	Xpander 1.5LSKA/T	-	-	-	-	-	-	Pembelian	31/12/2021	226.000.000,00
1297	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Batam	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		Toyota	Hiace Commuter M/T	2494 CC	-	JTFSS22P2L0191845	2KDB050784	BP 7674 DD	Q08874048	Pembelian	08/08/2022	202.360.000,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1298	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Batam	1.3.2.2.1.6.58	Mobil Operasional PJR	1		Toyota	Hiace	-	-	-	-	-	-	Pembelian	31/03/2020	185.570.000,00
1299	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Batam	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		HONDA SUPRA X 125	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	16/09/2022	17.785.000,00
1300	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Batam	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	1		MITSHUBISHI	COLT L300 PU	-	-	-	-	-	-	Pembelian	30/06/2023	192.000.000,00
1301	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Batam	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		Toyota	Hiace Commuter MT	-	-	-	-	-	-	Pembelian	31/12/2021	350.000.000,00
1302	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Batam	1.3.2.2.1.4.6	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1		HONDA	PCX 160 ABS	-	-	-	-	-	-	Pembelian	20/12/2023	34.060.000,00
1303	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Batam	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		Toyota	Hi Ace (Second)	2779	-	LH1251013042	3L4421401	BP7133ZN	M-11503810	Pembelian	31/12/1997	40.000.000,00
1304	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Batam	1.3.2.2.1.6.22	Truck Sampah	1		Standar	3 in 1	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/09/2023	2.250.000,00
1305	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Batam	1.3.2.2.1.6.22	Truck Sampah	2		Standar	3 in 1	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/09/2023	2.250.000,00
1306	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Batam	1.3.2.2.1.6.22	Truck Sampah	3		Standar	3 in 1	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/09/2023	2.250.000,00
1307	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Batam	1.3.2.2.1.6.22	Truck Sampah	4		Standar	3 in 1	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/09/2023	2.250.000,00
1308	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Batam	1.3.2.2.1.6.22	Truck Sampah	5		Standar	3 in 1	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/09/2023	2.250.000,00
1309	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Batam	1.3.2.2.1.6.22	Truck Sampah	6		Standar	3 in 1	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/09/2023	2.250.000,00
1310	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Batam	1.3.2.2.1.6.22	Truck Sampah	7		Standar	3 in 1	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/09/2023	2.250.000,00
1311	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Batam	1.3.2.2.1.6.22	Truck Sampah	8		Standar	3 in 1	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/09/2023	2.250.000,00
1312	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Batam	1.3.2.2.1.6.22	Truck Sampah	9		Standar	3 in 1	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/09/2023	2.250.000,00
1313	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Batam	1.3.2.2.1.6.22	Truck Sampah	10		Standar	3 in 1	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/09/2023	2.250.000,00
1314	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Batam	1.3.2.2.1.6.22	Truck Sampah	11		Standar	3 in 1	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/09/2023	2.250.000,00
1315	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Batam	1.3.2.2.1.6.22	Truck Sampah	12		Standar	3 in 1	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/09/2023	2.250.000,00
1316	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Batam	1.3.2.2.1.6.22	Truck Sampah	13		Standar	3 in 1	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/09/2023	2.250.000,00
1317	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Batam	1.3.2.2.1.6.22	Truck Sampah	14		Standar	3 in 1	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/09/2023	2.250.000,00
1318	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Batam	1.3.2.2.1.6.22	Truck Sampah	15		Standar	3 in 1	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/09/2023	2.250.000,00
1319	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Batam	1.3.2.2.1.6.22	Truck Sampah	16		Standar	3 in 1	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/09/2023	2.250.000,00
1320	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Batam	1.3.2.2.1.6.22	Truck Sampah	17		Standar	3 in 1	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/09/2023	2.250.000,00
1321	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Batam	1.3.2.2.1.6.22	Truck Sampah	18		Standar	3 in 1	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/09/2023	2.250.000,00
1322	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Batam	1.3.2.2.1.6.22	Truck Sampah	19		Standar	3 in 1	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/09/2023	2.250.000,00
1323	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Batam	1.3.2.2.1.6.22	Truck Sampah	20		Standar	3 in 1	-	-	-	-	-	-	Pembelian	29/09/2023	2.250.000,00
1324	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjungpinang	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		-	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	01/01/2006	8.641.500,00
1325	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjungpinang	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		Honda	-	-	-	-	-	BP2222TD	-	Hibah	01/01/2006	8.050.000,00
1326	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjungpinang	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		Suzuki	Smash	110cc	-	MH8FD110C6J-635115	E405-ID-634605	BP 2082 T	E1014730	Hibah	01/01/2006	8.641.500,00
1327	Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tanjungpinang	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		SUZUKI	SMASH	110CC	-	MH8PD1106C6J-633720	E405-C0-634048	BP 2073 T	E-1014731	Hibah	01/01/2006	8.641.500,00
1328	Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Tanjungpinang	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		Suzuki Smash	-	-	-	-	-	Nopol Lama	BP 6516 T	Hibah	01/01/2007	9.258.750,00
1329	Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tanjungpinang	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		-	-	-	-	-	-	BP 2075 T	-	Hibah	01/01/2006	8.641.500,00
1330	Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Tanjungpinang	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		SUZUKI	SMASH	-	-	MH8FD110C6J-633759	E405-10-633800	BP 6242 T	E1014737	Hibah	01/01/2016	8.641.500,00
1331	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjungpinang	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		Suzuki	Smash	110CC	-	MH8FD110C6J-CD-633499	E405-ID-633499	BP 2088 T	E1014742	Hibah	01/01/2007	9.600.000,00
1332	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tanjungpinang	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		Suzuki Smash	-	-	-	-	-	BP 2062 T	-	Hibah	01/01/2006	8.641.500,00

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1333	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karimun	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		HONDA	REVO X 110	-	-	-	-	-	-	Pembelian	16/05/2023	23.310.000,00
1334	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karimun	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	1		Kijang Toyota	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2011	15.656.000,00
1335	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Toapaya	1.3.2.2.1.3.7	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1		KAISAR TRISEDA	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2016	37.685.100,00
1336	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Lingga	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		Honda Revo	-	-	-	MH1JBE11CK404639	JBE1E1394889	BP 3814 A	I 11554007	Hibah	31/12/2012	12.000.000,00
1337	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Siantan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		-	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2007	13.531.000,00
1338	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palmatak	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		-	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2007	13.531.000,00
1339	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jemaja	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		Honda NF 100SL	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2007	13.531.000,00
1340	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bunguran Barat	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		Honda NF 100SL	-	-	-	-	-	BP 2443 N	-	hibah	31/12/2007	13.531.000,00
1341	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pulau Tiga	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		HONDA NF 100SL	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2007	13.531.000,00
1342	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Subi	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		HONDA NF 100 SL	-	-	-	-	-	-	-	Hibah	31/12/2007	13.531.000,00
1343	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bunguran Barat	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		-	-	-	-	-	-	BP 2552 N	-	hibah	31/12/2007	13.531.000,00
1344	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bunguran Barat	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		-	-	-	-	-	-	BP 2831 NA	-	hibah	31/12/2010	14.998.500,00
1345	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bunguran Barat	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		-	-	-	-	-	-	BP 2832 NA	-	hibah	31/12/2011	14.998.500,00
1346	Dinas Kebudayaan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	5		Toyota	New Avanza Veloz 1.5 A/T	1500 CC	-	MHKM1CB4JDK027907	3SZ-DEB4917	BP 1430 A	K00548769	Pembelian	18/09/2013	191.442.663,00
1347	Dinas Kebudayaan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	2		Toyota	KIJANG INOVA	2000 CC	-	MHFXW42G9D2255551	1TR75324006	BP 1356 A	K-02520888	Pembelian	28/06/2013	262.400.000,00
1348	Dinas Kebudayaan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	3		Suzuki	Ertiga	1373	-	MHYKZE81SEJ216836	K14BT1120225	BP 1473 A	K06976282	Pembelian	17/06/2014	197.840.000,00
1349	Dinas Kebudayaan	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	4		Toyota	Avanza Veloz	1500 CC	-	MHKM1CB4JDK020168	DDR0517	BP 1357 A	K-02520889	Pembelian	28/06/2013	186.450.000,00
1350	Dinas Kebudayaan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	5		HONDA	NEW VARIO TECHNO 125	125 CC	-	MH1JFC118CK154244	JFC1E1155628	BP 2832 A	J-05800604	Pembelian	28/12/2012	15.230.000,00
1351	Dinas Kebudayaan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	6		HONDA	HONDA BEAT	110 CC	-	MH1JFD117DK030909	JFD1E1027844	BP 2307 A	K-05873396	Pembelian	27/03/2013	12.363.000,00
1352	Dinas Kebudayaan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	7		HONDA	HONDA BEAT	110 CC	-	MH1JFD111DK031047	JFD1E1027988	BP 2308 A	K-05873397	Pembelian	27/03/2013	12.363.000,00
1353	Dinas Kebudayaan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	8		HONDA	HONDA BEAT	110 CC	-	MH1JFD11XDK031083	JFD1E1027997	BP 2309 A	K-05873398	Pembelian	27/03/2013	12.363.000,00
1354	Dinas Kebudayaan	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	1		TOYOTA	HILUX	2500 cc	-	MR0EW838XH0205355	1TRA339189	BP 8145 A	M-11509392	Pembelian	15/11/2017	195.500.000,00
1355	Dinas Kebudayaan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	9		HONDA	HONDA BEAT	110 CC	-	MH1JFD110DK030895	JFD1E1027810	BP 2310 A	K-05873399	Pembelian	27/03/2013	12.363.000,00
1356	Dinas Pemuda Dan Olahraga	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	4		Suzuki	New Ertiga Dreza GS AT 2016	1500 CC	-	MHYKZE81SHJ310748	K14BT1242497	BP 1637 A	M-10708520	Pembelian	15/06/2017	233.000.000,00
1357	Dinas Pemuda Dan Olahraga	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	6		Toyota Avanza	Avanza / 1.3 S A/T	1300 CC	-	MHM1BA3J6K004591	D861192	BP 1017 A	E No1503895	Pembelian	08/02/2006	135.286.800,00
1358	Dinas Pemuda Dan Olahraga	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	1		TOYOTA	AVANZA VELOZ	1495 CC	-	MHKM1CD4JEK032027	DEJ4108	BP 1254 A	K-06976182	Pembelian	05/05/2014	198.850.000,00
1359	Dinas Pemuda Dan Olahraga	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	2		DAIHATSU	TERIOS TX AT	1495 CC	-	MHKG2CK2J7K002188	DAF2862	BP 1570 A	8031253-D	Pembelian	03/12/2007	199.600.000,00
1360	Dinas Pemuda Dan Olahraga	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	3		SUZUKI	APV GX A/T	1495 CC	-	MHYGDN41V7J800713	G15A1D55941	BP 1147 A	8035372-D	Pembelian	04/12/2007	173.250.000,00
1361	Dinas Pemuda Dan Olahraga	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	3		SUZUKI CARRY 1.5	PICK UP	1493 CC	-	MHYESL4157J107907	G15A1D709946	BP 8201 A	8035377-D	Pembelian	04/12/2007	95.700.000,00
1362	Dinas Pemuda Dan Olahraga	1.3.2.2.1.3.2	Pick Up	4		TOYOTA	HILLUX 2 OL MT	2000 CC	-	MR0AW12G1E0045105	1TR7781399	BP 8036 A	L-03563360	Pembelian	15/04/2015	175.000.000,00
1363	Dinas Pemuda Dan Olahraga	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		HONDA	SUPRA X 125 CAKRAM	125CC	-	MHIJB81168K201271	JB 81E 1198374	BP 2117 A	F-4240157	Pembelian	01/04/2008	13.264.000,00
1364	Dinas Pemuda Dan Olahraga	1.3.2.2.1.2.2	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1		TOYOTA DYNA	MOBIL BUS	4009 cc	-	MHFCJU4345002053	W04DT-RJ11440	BP 7140 A	H-04649488	Hibah	19/05/2010	500.000.000,00
1365	Dinas Pemuda Dan Olahraga	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		HONDA	SUPRA X 125 CAKRAM	125	-	MHIJB81158PR235167	JB8IE-1232128	BP 2118 A	F-6120415	Pembelian	01/04/2008	13.264.000,00
1366	Dinas Pemuda Dan Olahraga	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3		HONDA	SUPRA X 125 CAKRAM	125	-	MHIJB81167K8361	JB81E1085642	BP 2053 A	8035819-D	Pembelian	05/11/2007	13.149.400,00
1367	Dinas Pemuda Dan Olahraga	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	4		HONDA	SUPRA X 125 CAKRAM	125	-	MHIJB81197K7015	JB81E1070961	BP 2054 A	8035820-D	Pembelian	05/11/2007	13.149.400,00
1368	Dinas Pemuda Dan Olahraga	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	5		YAMAHA	AEROX 155 VVA S-VERSION VI	155 cc	-	MH3SG1640JJ058288	G3J8E0044742	BP 4762 A	P-01872700	Pembelian	19/11/2018	29.595.000,00
1369	Dinas Pemuda Dan Olahraga	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	5		TOYOTA	NEW RUSH 1.5S A/T TRD VIN 2019	1500 CC	-	MHKE8FB3JKJ002062	2NRF910789	BP 1861 A	N-09142512	Pembelian	28/10/2019	259.000.000,00
1370	Dinas Pemuda Dan Olahraga	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	7		TOYOTA	Kijang innova	2000 CC	-	MHFXW426552016287	1TR-6030425	BP 39 A	D-2645808	Pembelian	21/03/2005	188.090.909,00
1371	Dinas Sosial	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		Honda	NF12A1CF MT	125 CC	-	MH1JBG117CK093603	JBG1E1093099	BP 3657 A	J 05800261	Pembelian	17/12/2012	15.508.000,00
1372	Dinas Sosial		Sepeda Motor			HONDA	BEAT SPORTY CBS	110 CC	-	MH1JM8131RK065211	JM81E3065604	BP 2416 A	U-05871005	Pembelian	2024	
1373	Dinas Sosial		Sepeda Motor			HONDA	BEAT SPORTY CBS	110 CC	-	MH1JM8132RK051141	JM81E3051975	BP 2417 A	U-05871006	Pembelian	2024	
1374	Dinas Sosial		Sepeda Motor			HONDA	BEAT SPORTY CBS	110 CC	-	MH1JM8139RK065277	JM81E3065662	BP 2418 A	U-05871008	Pembelian	2024	

No.	Nama Perangkat Daerah	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Jml	Merk	Type	CC	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	NO. BPKB	Asal usul	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1375	Dinas Sosial		Sepeda Motor			HONDA	BEAT SPORTY CBS	110 CC	-	MH1JM8131RK051132	JM81E3051875	BP 2419 A	U-05871007	Pembelian	2024	
1376	Dinas Sosial	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		ISUZU	ISUZU	-	-	-	-	-	-	Pembelian	07/12/2005	156.744.000,00
1377	Dinas Sosial	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2		ISUZU	ISUZU	-	-	-	-	-	-	Pembelian	07/12/2005	156.744.000,00
1378	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	1		SUZUKI APV DLX	GC415V APVDLXMT	1500 CC	-	MHYGDN42V9J323881	Q15AID189930	BP 1076 A	N4761224	Pembelian	11/11/2009	170.802.500,00
1379	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.3.2.2.1.1.1	Sedan	1		Suzuki Ertiga	ERTIGA GL AT NIK 2014	1500 CC	-	MHYKZE81SEJ215176	K14BT1118399	BP 1463 A	K-06975909	Pembelian	11/03/2014	185.430.000,00
1380	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3		HONDA VARIO	HILANG	HILANG	HILANG	MH1JF1267K210027	JF12E1214557	BP 3503 A	HILANG	Pembelian	08/05/2007	19.734.000,00
1381	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1		Honda	E1F02N12M2AIT	125 CC	-	MH1JFV1136K512951	3FV1E1520113	B 3158 PEQ	N 00445498	Hibah	12/09/2017	18.921.000,00
1382	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2		Honda	E1F02N12M2AIT	125 CC	-	MH1FV112GK513069	JFV1E1520373	B 3113 PEQ	N 00444780	Hibah	12/09/2017	18.921.000,00
1383	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	4		HONDA	VARIO 125	125 CC	-	MH1JM5115MK840955	JM51E1840335	BP 3082 A	R-02844618	Pembelian	05/03/2021	20.764.000,00
1384	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		Toyota	Avanza Veloz M/T	1495 cc	-	MHKM1CA4JDK033765	DDJ9907	BP 1378 A	K-02520844	Pembelian	08/05/2013	177.550.001,00
1385	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.3.2.2.1.6.1	Mobil Ambulance	1		Daihatsu	Luxio 1.5 X M/T	1495 CC	7316160 0-KDR-0001113 77	MHKW3CA3JGK016190	3S2DFY7830	BP 1486 A	N 11197466	Hibah	20/10/2016	206.455.000,00
1386	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.3.2.2.1.1.3	Station Wagon	2		Kijang	Innova	1495 CC	-	MHFXW42G162073684	1TR-6300448	BP 90 A	E-0739583	Pembelian	21/03/2005	188.090.909,00

RINCIAN AMORTISASI PER JENIS ASET TIDAK BERWUJUD

NO.	Nama SKPD	Kode Barang	Nama Barang	No. Reg	Masa Perolehan	Harga Perolehan	AKUMULASI AMORTISASI/ PENYUSUTAN 1 Jan 2025	AMORTISASI/PENYUSUTAN		AKUMULASI AMORTISASI/ PENYUSUTAN 31 Des 2025	NILAI BUKU
								SEMESTER 1	SEMESTER 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sekretariat DPRD	1.5.3.01.001.005.001	Software	00003	31-Dec-11	70.400.000,00	70.400.000,00	0,00	0,00	70.400.000,00	0,00
2	Sekretariat DPRD	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	31-Dec-09	49.747.000,00	49.747.000,00	0,00	0,00	49.747.000,00	0,00
3	Sekretariat DPRD	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	31-Dec-09	49.670.000,00	49.670.000,00	0,00	0,00	49.670.000,00	0,00
4	Sekretariat DPRD	1.5.3.01.001.005.001	Software	00004	04-Dec-18	16.015.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.015.476,00
5	Sekretariat DPRD	1.5.3.01.001.005.001	Software	00005	13-Dec-21	85.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.250.000,00
6	Sekretariat DPRD	1.5.3.01.001.005.001	Software	00006	15-Dec-22	98.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.700.000,00
7	Biro Hukum	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	16-Dec-13	49.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.324.000,00
8	Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	20-Jul-09	34.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.540.000,00
9	Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	12-Apr-10	34.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.540.000,00
10	Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00003	12-Nov-13	43.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.450.000,00
11	Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00004	18-Jun-12	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
12	Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00005	09-Jun-07	24.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.570.000,00
13	Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00006	29-Oct-07	49.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.693.000,00
14	Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00007	29-Oct-07	49.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.464.000,00
15	Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00008	29-Oct-07	49.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.590.000,00
16	Biro Perekonomian dan Pembangunan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00009	29-Dec-17	39.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.875.000,00
17	Biro Perekonomian Dan Pembangunan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	1	31 Oct 2023	67.066.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.066.200,00
20	Biro Umum	1.5.3.01.001.005.001	Software	00004	31-Dec-13	49.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.280.000,00
23	Biro Umum	1.5.3.01.001.005.001	Software	00007	31-Dec-15	199.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.551.000,00
24	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	17-Oct-21	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00
25	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	17-Nov-21	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00
28	Dinas Kesehatan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00003	29-Aug-14	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00
30	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	31-Dec-11	1.312.980.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.980.900,00
31	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	09-May-19	59.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.550.000,00
32	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	1.5.3.01.001.005.001	Software	00004	28-Oct-19	64.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.750.000,00
33	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	1.5.3.01.001.005.001	Software	00005	31-Dec-19	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
34	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	29-Dec-15	198.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000.000,00
35	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	31-Dec-12	412.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.500.000,00
36	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	1.5.3.01.001.005.001	Software	00003	31-Dec-13	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00
37	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	1.5.3.01.001.005.001	Software	00004	31-Dec-13	19.600.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600.000,03
38	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	1.5.3.01.001.005.001	Software	00005	31-Dec-13	19.600.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600.000,03
39	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	1.5.3.01.001.005.001	Software	00006	31-Dec-13	41.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300.000,00
40	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	1.5.3.01.001.005.001	Software	00007	31-Dec-13	39.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500.000,00
41	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	1.5.3.01.001.005.001	Software	00008	31-Dec-13	39.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500.000,00
42	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	1.5.3.01.001.005.001	Software	00009	31-Dec-15	44.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.275.000,00
43	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	1.5.3.01.001.005.001	Software	00010	10-Dec-18	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
44	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	1.5.3.01.001.005.001	Software	00011	15-Nov-23	4.952.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952.000.000,00
45	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	12-Jan-15	1.468.475.000,00	1.468.475.000,00	0,00	0,00	1.468.475.000,00	0,00
46	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	31-Dec-15	188.191.000,00	188.191.000,00	0,00	0,00	188.191.000,00	0,00
47	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00003	31-Dec-15	116.500.000,00	116.500.000,00	0,00	0,00	116.500.000,00	0,00
48	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00061	01-Oct-18	89.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.180.000,00
49	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00062	30-Dec-20	856.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.900.000,00
50	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00063	30-Dec-20	334.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.400.000,00
51	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00064	23-Dec-20	128.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.040.000,00
52	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00065	30-Dec-20	128.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.304.000,00
53	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00066	01-Sep-16	16.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390.000,00
54	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00067	01-Sep-16	16.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390.000,00
55	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00068	01-Sep-16	16.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390.000,00
56	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00069	24-Nov-15	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860.000,00
57	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00070	15-Sep-14	22.996.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.996.160,00
58	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00071	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
59	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00072	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
60	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00073	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
61	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00074	15-Sep-14	21.683.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.683.200,00
62	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00075	15-Sep-14	8.670.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.640,00
63	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00076	15-Sep-14	15.178.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.178.240,00
64	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00077	15-Sep-14	2.297.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.988,00
65	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00078	15-Sep-14	3.468.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468.960,00
66	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00079	15-Sep-14	1.734.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.656,00
67	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00080	15-Sep-14	2.081.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.728,00
68	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00081	23-Aug-14	22.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.990.000,00
69	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00082	23-Aug-14	19.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250.000,00
70	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00083	23-Aug-14	9.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790.000,00
71	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00084	23-Aug-14	17.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765.000,00
72	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00085	23-Aug-14	18.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.590.000,00
73	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00086	23-Aug-14	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
74	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00087	23-Aug-14	9.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790.000,00
75	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00088	23-Aug-14	5.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390.000,00
76	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00089	23-Aug-14	22.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.990.000,00
77	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00090	23-Aug-14	19.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250.000,00
78	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00091	23-Aug-14	9.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790.000,00
79	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00092	23-Aug-14	17.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765.000,00
80	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00093	23-Aug-14	18.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.590.000,00
81	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00094	23-Aug-14	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
82	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00095	23-Aug-14	9.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790.000,00
83	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00096	23-Aug-14	5.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390.000,00
84	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00097	21-Dec-21	99.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.660.000,00
85	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	16-Sep-15	204.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.127.000,00
86	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	15-Sep-14	22.996.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.996.160,00
87	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00003	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
88	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00004	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
89	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00005	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
90	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00006	15-Sep-14	21.683.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.683.200,00
91	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00007	15-Sep-14	8.670.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.640,00
92	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00008	15-Sep-14	15.178.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.178.240,00
93	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00009	15-Sep-14	2.297.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.988,00
94	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00010	15-Sep-14	3.468.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468.960,00
95	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00011	15-Sep-14	1.734.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.656,00
96	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00012	15-Sep-14	2.081.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.728,00
97	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	24-Nov-15	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860.000,00
98	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	01-Sep-16	16.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390.000,00
99	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	24-Nov-15	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860.000,00
100	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	15-Sep-14	22.996.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.996.160,00
101	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00003	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
102	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00004	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
103	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00005	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
104	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00006	15-Sep-14	21.683.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.683.200,00
105	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00007	15-Sep-14	8.670.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.640,00

NO.	Nama SKPD	Kode Barang	Nama Barang	No. Reg	Masa Perolehan	Harga Perolehan	AKUMULASI AMORTISASI/ PENYUSUTAN 1 Jan 2025	AMORTISASI/PENYUSUTAN		AKUMULASI AMORTISASI/ PENYUSUTAN 31 Des 2025	NILAI BUKU
								SEMESTER 1	SEMESTER 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00008	15-Sep-14	15.178.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.178.240,00
107	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00009	15-Sep-14	2.297.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.988,00
108	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00010	15-Sep-14	3.468.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468.960,00
109	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00011	15-Sep-14	1.734.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.656,00
110	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00012	15-Sep-14	2.081.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.728,00
111	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00013	23-Aug-14	22.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.990.000,00
112	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00014	23-Aug-14	19.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250.000,00
113	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00015	23-Aug-14	9.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790.000,00
114	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00016	23-Aug-14	17.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765.000,00
115	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00017	23-Aug-14	18.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.590.000,00
116	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00018	23-Aug-14	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
117	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00019	23-Aug-14	9.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790.000,00
118	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00020	23-Aug-14	5.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390.000,00
119	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00001	31-Dec-18	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
120	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00002	31-Dec-18	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
121	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	31-Dec-18	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
122	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	31-Dec-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
123	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00003	31-Dec-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
124	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00004	31-Dec-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
125	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00005	31-Dec-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
126	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00006	31-Dec-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
127	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00007	31-Dec-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
128	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00008	31-Dec-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
129	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00009	31-Dec-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
130	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00010	31-Dec-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
131	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00011	31-Dec-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
132	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00012	31-Dec-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
133	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00013	31-Dec-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
134	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00014	31-Dec-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
135	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00015	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
136	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00016	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
137	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00017	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
138	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00018	01-Sep-16	16.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390.000,00
139	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00019	24-Nov-15	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860.000,00
140	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	24-Nov-15	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860.000,00
141	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	01-Sep-16	16.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390.000,00
142	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	24-Nov-15	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860.000,00
143	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00001	27-Sep-18	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
144	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00002	27-Sep-18	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
145	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	27-Sep-18	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
146	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
147	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00003	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
148	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00004	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
149	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00005	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
150	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00006	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
151	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00007	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
152	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00008	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
153	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00009	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
154	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00010	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
155	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00011	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
156	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00012	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
157	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00013	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
158	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00014	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
159	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00015	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
160	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00016	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
161	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00017	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
162	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00018	01-Sep-16	16.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390.000,00
163	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00019	24-Nov-15	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860.000,00
164	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	24-Nov-15	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860.000,00
165	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	16-Sep-15	204.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.127.000,00
166	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	24-Nov-15	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860.000,00
167	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00001	23-Mar-18	14.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.542.000,00
168	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	23-Mar-18	27.824.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.824.500,00
169	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
170	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00003	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
171	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00004	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
172	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00005	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
173	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00006	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
174	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00007	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
175	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00008	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
176	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00009	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
177	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00010	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
178	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00011	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
179	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00012	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
180	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00013	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
181	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00014	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
182	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00015	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
183	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00016	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
184	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00017	15-Sep-14	22.996.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.996.160,00
185	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00018	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
186	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00019	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
187	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00020	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
188	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00021	15-Sep-14	21.683.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.683.200,00
189	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00022	15-Sep-14	8.670.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.640,00
190	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00023	15-Sep-14	15.178.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.178.240,00
191	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00024	15-Sep-14	2.297.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.988,00
192	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00025	15-Sep-14	3.468.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468.960,00
193	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00026	15-Sep-14	1.734.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.656,00
194	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00027	15-Sep-14	2.081.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.728,00
195	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	01-Sep-16	16.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390.000,00
196	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	31-Dec-18	271.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.590.000,00
197	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00001	31-Dec-21	8.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075.000,00
198	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00002	31-Dec-21	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00
199	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	31-Dec-18	271.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.590.000,00
200	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	31-Dec-18	271.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.590.000,00
201	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00001	30-Dec-21	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
202	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00002	30-Dec-21	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
203	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00003	30-Dec-21	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
204	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00004	30-Dec-21	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
205	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00005	30-Dec-21	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
206	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00006	30-Dec-21	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
207	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00007	30-Dec-21	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
208	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00008	30-Dec-21	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
209	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00009	30-Dec-21	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
210	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00010	30-Dec-21	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
211	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00011	30-Dec-21	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
212	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00012	30-Dec-21	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
213	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00013	30-Dec-21	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
214	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00014	30-Dec-21	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
215	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00015	30-Dec-21	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
216	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00016	30-Dec-21	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
217	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00017	30-Dec-21	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
218	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00018	30-Dec-21	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
219	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00019	30-Dec-21	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
220	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00020	30-Dec-21	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
221	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00021	30-Dec-21	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
222	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00022	30-Dec-21	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
223	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00023	30-Dec-21	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
224	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	16-Sep-15	204.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.127.000,00
225	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	15-Sep-14	22.996.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.996.160,00
226	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00003	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
227	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00004	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
228	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00005	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
229	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00006	15-Sep-14	21.683.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.683.200,00
230	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00007	15-Sep-14	8.670.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.640,00
231	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00008	15-Sep-14	15.178.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.178.240,00
232	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00009	15-Sep-14	2.297.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.988,00
233	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00010	15-Sep-14	3.468.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468.960,00
234	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00011	15-Sep-14	1.734.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.656,00
235	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00012	15-Sep-14	2.081.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.728,00
236	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	24-Nov-15	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860.000,00
237	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	15-Sep-14	22.996.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.996.160,00
238	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00003	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
239	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00004	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00

NO.	Nama SKPD	Kode Barang	Nama Barang	No. Reg	Masa Perolehan	Harga Perolehan	AKUMULASI AMORTISASI/ PENYUSUTAN 1 Jan 2025	AMORTISASI/PENYUSUTAN		AKUMULASI AMORTISASI/ PENYUSUTAN 31 Des 2025	NILAI BUKU
								SEMESTER 1	SEMESTER 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00005	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
241	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00006	15-Sep-14	21.683.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.683.200,00
242	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00007	15-Sep-14	8.670.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.640,00
243	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00008	15-Sep-14	15.178.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.178.240,00
244	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00009	15-Sep-14	2.297.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.988,00
245	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00010	15-Sep-14	3.468.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468.960,00
246	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00011	15-Sep-14	1.734.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.656,00
247	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00012	15-Sep-14	2.081.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.728,00
248	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	24-Nov-15	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860.000,00
249	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	15-Sep-14	22.996.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.996.160,00
250	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00003	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
251	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00004	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
252	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00005	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
253	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00006	15-Sep-14	21.683.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.683.200,00
254	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00007	15-Sep-14	8.670.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.640,00
255	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00008	15-Sep-14	15.178.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.178.240,00
256	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00009	15-Sep-14	2.297.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.988,00
257	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00010	15-Sep-14	3.468.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468.960,00
258	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00011	15-Sep-14	1.734.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.656,00
259	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00012	15-Sep-14	2.081.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.728,00
260	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00001	23-Mar-18	14.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.542.000,00
261	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	23-Mar-18	27.824.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.824.500,00
262	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
263	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00003	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
264	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00004	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
265	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00005	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
266	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00006	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
267	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00007	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
268	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00008	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
269	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00009	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
270	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00010	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
271	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00011	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
272	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00012	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
273	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00013	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
274	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00014	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
275	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00015	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
276	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00016	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
277	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00017	24-Nov-15	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860.000,00
278	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00018	23-Aug-14	22.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.990.000,00
279	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00019	23-Aug-14	19.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250.000,00
280	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00020	23-Aug-14	9.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790.000,00
281	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00021	23-Aug-14	17.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765.000,00
282	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00022	23-Aug-14	18.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.590.000,00
283	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00023	23-Aug-14	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
284	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00024	23-Aug-14	9.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790.000,00
285	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00025	23-Aug-14	5.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390.000,00
286	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	24-Nov-15	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860.000,00
287	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	31-Dec-18	271.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.590.000,00
288	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	31-Dec-18	271.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.590.000,00
289	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	01-Sep-16	16.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390.000,00
290	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	24-Nov-15	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860.000,00
291	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00003	15-Sep-14	22.996.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.996.160,00
292	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00004	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
293	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00005	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
294	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00006	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
295	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00007	15-Sep-14	21.683.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.683.200,00
296	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00008	15-Sep-14	8.670.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.640,00
297	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00009	15-Sep-14	15.178.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.178.240,00
298	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00010	15-Sep-14	2.297.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.988,00
299	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00011	15-Sep-14	3.468.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468.960,00
300	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00012	15-Sep-14	1.734.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.656,00
301	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00013	15-Sep-14	2.081.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.728,00
302	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	23-Mar-18	14.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.542.000,00
303	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	23-Mar-18	27.824.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.824.500,00
304	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00003	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
305	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00004	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
306	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00005	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
307	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00006	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
308	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00007	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
309	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00008	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
310	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00009	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
311	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00010	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
312	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00011	31-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
313	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00012	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
314	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00013	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
315	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00014	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
316	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00015	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
317	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00016	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
318	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00017	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
319	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00018	24-Nov-15	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860.000,00
320	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00019	23-Aug-14	22.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.990.000,00
321	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00020	23-Aug-14	19.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250.000,00
322	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00021	23-Aug-14	9.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790.000,00
323	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00022	23-Aug-14	17.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765.000,00
324	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00023	23-Aug-14	18.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.590.000,00
325	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00024	23-Aug-14	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
326	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00025	23-Aug-14	9.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790.000,00
327	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00026	23-Aug-14	5.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390.000,00
328	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	24-Nov-15	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860.000,00
329	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	16-Sep-15	204.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.127.000,00
330	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00001	27-Sep-18	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
331	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00002	27-Sep-18	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
332	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	27-Sep-18	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
333	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
334	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00003	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
335	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00004	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
336	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00005	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
337	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00006	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
338	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00007	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
339	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00008	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
340	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00009	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
341	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00010	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
342	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00011	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
343	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00012	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
344	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00013	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
345	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00014	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
346	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00015	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
347	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00016	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
348	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00017	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
349	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00018	24-Nov-15	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860.000,00
350	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00019	15-Sep-14	22.996.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.996.160,00
351	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00020	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
352	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00021	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
353	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00022	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
354	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00023	15-Sep-14	21.683.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.683.200,00
355	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00024	15-Sep-14	8.670.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.640,00
356	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00025	15-Sep-14	15.178.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.178.240,00
357	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00026	15-Sep-14	2.297.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.988,00
358	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00027	15-Sep-14	3.468.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468.960,00
359	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00028	15-Sep-14	1.734.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.656,00
360	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00029	15-Sep-14	2.081.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.728,00
361	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	01-Sep-16	16.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390.000,00
362	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	24-Nov-15	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860.000,00
363	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	01-Sep-16	16.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390.000,00
364	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	24-Nov-15	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860.000,00
365	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	15-Sep-14	22.996.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.996.160,00
366	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00003	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
367	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00004	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
368	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00005	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
369	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00006	15-Sep-14	21.683.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.683.200,00
370	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00007	15-Sep-14	8.670.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.640,00
371	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00008	15-Sep-14	15.178.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.178.240,00
372	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00009	15-Sep-14	2.297.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.988,00
373	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00010	15-Sep-14	3.468.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468.960,00

NO.	Nama SKPD	Kode Barang	Nama Barang	No. Reg	Masa Perolehan	Harga Perolehan	AKUMULASI AMORTISASI/ PENYUSUTAN 1 Jan 2025	AMORTISASI/PENYUSUTAN		AKUMULASI AMORTISASI/ PENYUSUTAN 31 Des 2025	NILAI BUKU
								SEMESTER 1	SEMESTER 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00011	15-Sep-14	1.734.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.656,00
375	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00012	15-Sep-14	2.081.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.728,00
376	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00013	23-Aug-14	22.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.990.000,00
377	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00014	23-Aug-14	19.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250.000,00
378	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00015	23-Aug-14	9.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790.000,00
379	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00016	23-Aug-14	17.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765.000,00
380	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00017	23-Aug-14	18.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.590.000,00
381	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00018	23-Aug-14	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
382	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00019	23-Aug-14	9.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790.000,00
383	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00020	23-Aug-14	5.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390.000,00
384	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	01-Sep-16	16.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390.000,00
385	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	24-Nov-15	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860.000,00
386	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00001	23-Mar-18	14.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.542.000,00
387	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	23-Mar-18	27.824.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.824.500,00
388	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
389	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00003	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
390	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00004	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
391	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00005	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
392	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00006	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
393	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00007	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
394	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00008	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
395	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00009	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
396	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00010	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
397	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00011	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
398	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00012	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
399	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00013	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
400	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00014	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
401	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00015	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
402	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00016	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
403	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00017	16-Sep-15	204.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.127.000,00
404	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00018	15-Sep-14	22.996.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.996.160,00
405	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00019	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
406	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00020	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
407	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00021	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
408	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00022	15-Sep-14	21.683.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.683.200,00
409	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00023	15-Sep-14	8.670.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.640,00
410	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00024	15-Sep-14	15.178.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.178.240,00
411	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00025	15-Sep-14	2.297.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.988,00
412	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00026	15-Sep-14	3.468.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468.960,00
413	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00027	15-Sep-14	1.734.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.656,00
414	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00028	15-Sep-14	2.081.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.728,00
415	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	01-Sep-16	16.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390.000,00
416	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	24-Nov-15	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860.000,00
417	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	24-Nov-15	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860.000,00
418	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	15-Sep-14	117.141.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.141.332,00
419	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	23-Mar-18	14.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.542.000,00
420	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
421	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00003	23-Mar-18	27.824.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.824.500,00
422	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00004	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
423	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00005	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
424	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00006	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
425	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00007	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
426	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00008	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
427	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00009	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
428	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00010	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
429	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00011	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
430	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00012	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
431	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00013	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
432	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00014	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
433	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00015	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
434	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00016	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
435	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00017	23-Mar-18	2.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
436	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00018	24-Nov-15	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860.000,00
437	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	24-Sep-15	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860.000,00
438	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	31-Dec-07	40.700.000,00	40.700.000,00	0,00	0,00	40.700.000,00	0,00
439	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	31-Dec-07	40.700.000,00	40.700.000,00	0,00	0,00	40.700.000,00	0,00
440	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00003	31-Dec-07	40.700.000,00	40.700.000,00	0,00	0,00	40.700.000,00	0,00
441	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00004	31-Dec-07	40.700.000,00	40.700.000,00	0,00	0,00	40.700.000,00	0,00
442	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00001	27-Sep-18	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
443	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	00002	27-Sep-18	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
444	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00005	27-Sep-18	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
445	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00006	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
446	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00007	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
447	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00008	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
448	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00009	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
449	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00010	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
450	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00011	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
451	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00012	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
452	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00013	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
453	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00014	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
454	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00015	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
455	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00016	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
456	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00017	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
457	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00018	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
458	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00019	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
459	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00020	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
460	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00021	27-Sep-18	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
461	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00022	16-Sep-15	204.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.127.000,00
462	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00023	15-Sep-14	22.996.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.996.160,00
463	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00024	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
464	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00025	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
465	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00026	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
466	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00027	15-Sep-14	21.683.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.683.200,00
467	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00028	15-Sep-14	8.670.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.640,00
468	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00029	15-Sep-14	15.178.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.178.240,00
469	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00030	15-Sep-14	2.297.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.988,00
470	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00031	15-Sep-14	3.468.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468.960,00
471	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00032	15-Sep-14	1.734.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.656,00
472	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00033	15-Sep-14	2.081.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.728,00
473	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	01-Sep-16	16.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390.000,00
474	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	23-Aug-14	22.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.990.000,00
475	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00003	23-Aug-14	19.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250.000,00
476	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00004	23-Aug-14	9.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790.000,00
477	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00005	23-Aug-14	17.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765.000,00
478	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00006	23-Aug-14	18.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.590.000,00
479	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00007	23-Aug-14	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
480	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00008	23-Aug-14	9.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790.000,00
481	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00009	23-Aug-14	5.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390.000,00
482	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	24-Nov-15	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860.000,00
483	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	24-Nov-15	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860.000,00
484	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	15-Sep-14	22.996.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.996.160,00
485	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00003	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
486	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00004	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
487	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00005	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
488	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00006	15-Sep-14	21.683.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.683.200,00
489	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00007	15-Sep-14	8.670.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.640,00
490	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00008	15-Sep-14	15.178.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.178.240,00
491	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00009	15-Sep-14	2.297.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.988,00
492	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00010	15-Sep-14	3.468.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468.960,00
493	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00011	15-Sep-14	1.734.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.656,00
494	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00012	15-Sep-14	2.081.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.728,00
495	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00013	23-Aug-14	22.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.990.000,00
496	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00014	23-Aug-14	19.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250.000,00
497	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00015	23-Aug-14	9.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790.000,00
498	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00016	23-Aug-14	17.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765.000,00
499	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00017	15-Sep-14	18.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.590.000,00
500	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00018	23-Aug-14	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
501	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00019	23-Aug-14	9.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790.000,00
502	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00020	23-Aug-14	5.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390.000,00
503	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	24-Nov-15	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860.000,00
504	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	24-Nov-15	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860.000,00
505	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	24-Nov-15	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.860.000,00
506	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	15-Sep-14	22.996.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.996.160,00
507	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00003	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00

NO.	Nama SKPD	Kode Barang	Nama Barang	No. Reg	Masa Perolehan	Harga Perolehan	AKUMULASI AMORTISASI/ PENYUSUTAN 1 Jan 2025	AMORTISASI/PENYUSUTAN		AKUMULASI AMORTISASI/ PENYUSUTAN 31 Des 2025	NILAI BUKU
								SEMESTER 1	SEMESTER 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00004	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
509	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00005	15-Sep-14	13.009.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009.920,00
510	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00006	15-Sep-14	21.683.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.683.200,00
511	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00007	15-Sep-14	8.670.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.640,00
512	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00008	15-Sep-14	15.178.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.178.240,00
513	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00009	15-Sep-14	2.297.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.988,00
514	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00010	15-Sep-14	3.468.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468.960,00
515	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00011	15-Sep-14	1.734.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.656,00
516	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00012	15-Sep-14	2.081.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.728,00
517	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00013	23-Aug-14	22.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.990.000,00
518	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00014	23-Aug-14	19.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250.000,00
519	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00015	23-Aug-14	9.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790.000,00
520	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00016	23-Aug-14	17.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765.000,00
521	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00017	23-Aug-14	18.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.590.000,00
522	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00018	23-Aug-14	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
523	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00019	15-Sep-14	9.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790.000,00
524	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00020	23-Aug-14	5.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390.000,00
525	Dinas Pendidikan	1.5.3.01.001.006.001	Kajian	00001	31-Dec-22	30.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.910.000,00
526	Dinas Kebudayaan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	11-Nov-14	35.167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.167.000,00
527	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	31-Dec-15	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
528	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	31-Dec-15	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
529	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.5.3.01.001.005.001	Software	00003	31-Dec-15	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
530	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.5.3.01.001.005.001	Software	00004	31-Dec-15	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
531	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.5.3.01.001.005.001	Software	00005	31-Dec-15	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
532	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.5.3.01.001.005.001	Software	00006	31-Dec-15	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
533	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.5.3.01.001.005.001	Software	00007	31-Dec-15	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
534	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.5.3.01.001.005.001	Software	00008	31-Dec-15	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
535	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.5.3.01.001.005.001	Software	00009	31-Dec-15	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
536	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.5.3.01.001.005.001	Software	00010	31-Dec-15	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
537	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.5.3.01.001.005.001	Software	00011	13-Dec-21	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
538	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1.5.3.01.001.002.001	Lisensi dan Frenchise	00001	31-Dec-16	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
539	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	29-Dec-17	24.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900.000,00
540	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	27-Feb-14	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
541	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	10-May-22	15.101.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.101.451,00
542	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	31-Dec-13	34.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650.000,00
543	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	31-Dec-16	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
544	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	31-Dec-09	39.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400.000,00
545	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	31-Dec-14	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
546	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	31-Dec-14	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
547	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00003	31-Dec-14	79.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000.000,00
548	Badan Pendapatan Daerah	1.5.3.01.001.002.001	Lisensi dan Frenchise	00001	29-Oct-21	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
549	Badan Pendapatan Daerah	1.5.3.01.001.002.001	Lisensi dan Frenchise	00002	21-Apr-22	1.299.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.999,00
550	Badan Pendapatan Daerah	1.5.3.01.001.002.001	Lisensi dan Frenchise	00003	21-Apr-22	1.299.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.999,00
551	Badan Pendapatan Daerah	1.5.3.01.001.002.001	Lisensi dan Frenchise	00004	21-Apr-22	1.299.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.999,00
552	Badan Pendapatan Daerah	1.5.3.01.001.002.001	Lisensi dan Frenchise	00005	21-Apr-22	15.101.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.101.549,00
553	Badan Pendapatan Daerah	1.5.3.01.001.002.001	Lisensi dan Frenchise	00006	21-Apr-22	4.402.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402.164,00
554	Badan Pendapatan Daerah	1.5.3.01.001.002.001	Lisensi dan Frenchise	00007	21-Apr-22	2.116.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116.359,00
555	Badan Pendapatan Daerah	1.5.3.01.001.002.001	Lisensi dan Frenchise	00008	01-Jul-22	73.121.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.121.580,00
556	Badan Pendapatan Daerah	1.5.3.01.001.002.001	Lisensi dan Frenchise	00009	30 Nov 2023	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
556	Badan Pendapatan Daerah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00010	21 Oct 2025	2.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575.000,00
556	Badan Pendapatan Daerah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00011	21 Oct 2025	27.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450.000,00
556	Badan Pendapatan Daerah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00012	21 Oct 2025	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00
557	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	15-Dec-15	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
560	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00005	07-Dec-20	23.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800.000,00
561	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00006	07-Dec-20	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00
562	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00007	07-Dec-20	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00
563	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00008	07-Dec-20	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00
564	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00009	07-Dec-20	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00
565	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00010	07-Dec-20	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00
566	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00011	21-Dec-22	49.339.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.339.500,00
567	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00012	21-Dec-22	49.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.395.000,00
568	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	03-Jun-15	19.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.932.000,00
569	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00013	27 Dec 2023	98.401.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.401.500,00
570	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00014	28 Dec 2023	79.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.032.000,00
571	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00015	4 Dec 2023	58.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.985.000,00
572	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00016	24 Dec 2025	44.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400.000,00
573	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00016	24 Dec 2025	44.455.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.455.500,00
574	Inspektorat Daerah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	31-Dec-14	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
575	Inspektorat Daerah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	31-Dec-14	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00
576	Inspektorat Daerah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00003	31-Dec-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	Inspektorat Daerah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00004	29-Dec-17	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
578	Inspektorat Daerah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00005	29-Dec-17	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
579	Inspektorat Daerah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00006	31-Dec-19	197.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.945.000,00
580	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	24-Nov-21	34.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.936.000,00
581	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	10-Aug-21	99.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.990.000,00
582	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00003	13-Dec-21	220.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.770.000,00
583	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00004	13-Dec-21	29.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.920.000,00
584	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00005	13-Dec-21	49.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.720.000,00
585	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00006	13-Dec-21	48.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.840.000,00
586	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.5.3.01.001.006.001	Kajian	00001	31-Dec-22	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00
587	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	31-Dec-15	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00
588	Dinas Pariwisata	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	07-Dec-17	9.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790.000,00
589	Dinas Pariwisata	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	07-Dec-17	18.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.370.000,00

NO.	Nama SKPD	Kode Barang	Nama Barang	No. Reg	Masa Perolehan	Harga Perolehan	AKUMULASI AMORTISASI/ PENYUSUTAN 1 Jan 2025	AMORTISASI/PENYUSUTAN		AKUMULASI AMORTISASI/ PENYUSUTAN 31 Des 2025	NILAI BUKU
								SEMESTER 1	SEMESTER 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
590	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.5.3.01.001.006.001	Kajian	00001	31-Dec-23	99.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.633.000,00
591	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.5.3.01.001.006.001	Kajian	00002	31-Dec-23	99.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.633.000,00
592	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.5.3.01.001.006.001	Kajian	00003	31-Dec-23	99.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.558.000,00
593	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.5.3.01.001.006.001	Kajian	00004	31-Dec-23	99.527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.527.000,00
594	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.5.3.01.001.006.001	Kajian	00005	31-Dec-23	99.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.555.000,00
595	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.5.3.01.001.006.001	Kajian	00006	31-Dec-23	99.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.678.000,00
596	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.5.3.01.001.006.001	Kajian	00007	31-Dec-23	99.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.688.000,00
597	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.5.3.01.001.006.001	Kajian	00008	31-Dec-23	99.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.678.000,00
598	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.5.3.01.001.006.001	Kajian	00009	31-Dec-23	99.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.789.000,00
599	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.5.3.01.001.006.001	Kajian	00010	31-Dec-23	99.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.688.000,00
600	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.5.3.01.001.006.001	Kajian	00011	31-Dec-23	99.644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.644.000,00
601	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.5.3.01.001.006.001	Kajian	00012	31-Dec-23	99.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.633.000,00
602	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.5.3.01.001.006.001	Kajian	00013	31-Dec-23	77.521.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.521.845,00
603	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.5.3.01.001.006.001	Kajian	00014	31-Dec-23	99.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800.000,00
604	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.5.3.01.001.006.001	Kajian	00015	31-Dec-23	77.600.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600.100,00
605	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.5.3.01.001.006.001	Kajian	00016	31-Dec-23	77.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.333.000,00
606	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.5.3.01.001.006.001	Kajian	00017	31-Dec-23	99.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800.000,00
607	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.5.3.01.001.006.001	Kajian	00018	31-Dec-23	99.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800.000,00
608	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.5.3.01.001.006.001	Kajian	00019	31-Dec-23	77.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600.000,00
609	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.5.3.01.001.006.001	Kajian	00020	31-Dec-23	77.699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.699.000,00
610	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.5.3.01.001.006.001	Kajian	00021	31-Dec-23	99.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.883.000,00
611	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.5.3.01.001.006.001	Kajian	00022	31-Dec-23	98.671.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.671.785,00
612	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.5.3.01.001.006.001	Kajian	00023	31-Dec-23	91.573.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.573.890,00
613	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.5.3.01.001.006.001	Kajian	00024	31-Dec-23	80.107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.107.500,00
614	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.5.3.01.001.006.001	Kajian	00025	31-Dec-23	99.685.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.685.770,00
615	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.5.3.01.001.006.001	Kajian	00026	31-Dec-23	99.658.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.658.020,00
616	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	31-Dec-09	14.998.500,00	14.998.500,00	0,00	0,00	14.998.500,00	0,00
617	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	31-Dec-15	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00
618	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	10-Jul-14	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
619	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	1.5.3.01.001.005.001	Software	00006	29-Dec-17	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
620	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	1.5.3.01.001.005.001	Software	00007	29-Dec-17	12.352.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.352.711,00
621	Badan Penghubung Daerah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	11-Jul-13	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
622	Badan Penghubung Daerah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00003	31-Dec-17	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500.000,00
623	Badan Penghubung Daerah	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	31-Dec-11	28.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.468.000,00
624	Badan Penghubung Daerah	1.5.3.01.001.005.002	Software Lainnya	1	25 Sep 2023	43.060.230,00	0,00			0,00	43.060.230,00
625	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	29-Dec-17	286.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000.000,00
626	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	29-Dec-17	176.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.550.000,00
627	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.5.3.01.001.005.001	Software	00004	29-Dec-17	120.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.450.000,00
628	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.5.3.01.001.002.001	Lisensi dan Frenchise	00002	18-Nov-19	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00
629	Dinas Kepustakaan dan Kearsipan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	31-Dec-07	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
630	Dinas Kepustakaan dan Kearsipan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00002	31-Dec-09	14.999.820,00	14.999.820,00	0,00	0,00	14.999.820,00	0,00
631	Dinas Kepustakaan dan Kearsipan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00011	22-Dec-06	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
632	Dinas Kepustakaan dan Kearsipan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00012	31-Dec-14	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00
633	Dinas Kepustakaan dan Kearsipan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00013	29-Dec-17	133.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000.000,00
634	Dinas Kepustakaan dan Kearsipan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00014	09-Apr-18	342.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.633.000,00
635	Dinas Kepustakaan dan Kearsipan	1.5.3.01.001.005.001	Software	00017	14 Apr 2023	74.991.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.991.600,00
636	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	1.5.3.01.001.005.001	Software	00001	26 Jul 2024	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
				JUMLAH		**26.469.264.427,06**	**2.413.781.320,00**	**0,00**	**0,00**	**2.413.781.320,00**	**24.055.483.107,06**

LAMPIRAN 8

REKAPITULASI PENERIMAAN DITERIMA DIMUKA OPD
PER 31 DESEMBER 2025

No	Jenis Pendapatan Diterima Dimuka	Jumlah
1	**Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III (bersumber dari Pendapatan Retribusi**	**900.368.250,00**
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	900.368.250,00
2	**Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja (Sumber dari Pendapatan Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD)**	**121.360.441,67**
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	121.360.441,67
3	**Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi (Sumber dari Pendapatan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan)**	**116.666.666,67**
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	116.666.666,67
4	**Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Sumber dari Pendapatan Retribusi Pemakaian Ruangan)**	**131.707.700,00**
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	37.510.000,00
	Badan Pendapatan Daerah	27.600.000,00
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	66.597.700,00
	Total	**1.270.103.058,34**

LAMPIRAN 8A

REKAPITULASI PENERIMAAN DITERIMA DIMUKA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sumber dari Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

NO	Nama TKA	Tipe	Barcode Pengesahan RPTKA	Nomor Pengesahan RPTKA	Tanggal Terbit	Jangka Waktu	Berlaku Mulai	Berlaku Sampai	Warga Negara	Nomor Paspor	Jenis Kelamin	Jabatan	Level Jabatan	Provinsi Penempatan	Kabupaten Penempatan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Status Badan Usaha	Sektor Usaha	STBP	Nilai	Tanggal akhir tahun anggaran 2025	Perhitungan Bulan	Pendapatan IMTA diterima Dimuka	Pendapatan Imta Tahun Berjalan (LO)
1	SIVAJI SURENDRAN	Perpanjangan	51899480	7047	17/01/2025	12	21/01/2025	28/01/2026	India	S5851534	L	MECHANICAL ENGINEER	PROFESIONAL	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Karimun(Kab)	PT. SPCO PIPE LINE SERVICES	KAWASAN BINTANG INDUSTRI II LOT. D NO. 611 KEL. TANJUNG UNCANG, KEC. BATU AJI	PMA	JASA PERBAIKAN DAN PERAWATAN KAPAL	21.00/41.0/000001/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/2/2025	19.884.000,00	31/12/2025	11	1.657.000,00	18.227.000,00
2	JOVEN LIWAG	Perpanjangan	51927158	8407	21/01/2025	12	23/01/2025	14/02/2026	Philippines	P3569804C	L	SYSTEM LEAD ENGINEER	PROFESIONAL	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Karimun(Kab)	ASPIDISTRA PT	TIBAN INDAH PERMAI BLOK R NO. 38 SEKUPANG BATAM	Perusahaan Swasta Nasional	JASA KONSTRUKSI	21.00/41.0/000002/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/2/2025	19.296.000,00	31/12/2025	11	1.608.000,00	17.688.000,00
3	MUTHU VEERAPPAN ARUMUGAM	Perpanjangan	51958960	15067	07/02/2025	12	10/02/2025	13/02/2026	India	B9086561	L	PROJECT MANAGER	MANAGER	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Karimun(Kab)	PT. SPCO PIPE LINE SERVICES	KAWASAN BINTANG INDUSTRI II LOT. D NO. 611 KEL. TANJUNG UNCANG, KEC. BATU AJI	PMA	JASA PERBAIKAN DAN PERAWATAN KAPAL	21.00/41.0/000003/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/3/2025	19.818.000,00	31/12/2025	10	3.303.000,00	16.515.000,00
4	MUTHU SELVAM NEMMELI	Perpanjangan	51955488	15694	10/02/2025	12	11/02/2025	14/02/2026	India	Z8068532	L	PROJECT MANAGER	MANAGER	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Bintan(Kab), Karimun(Kab)	PT SUTAN & HARITZ	GRIYA SAGULUNG PERMAI, Blok G, Nomor 13, RT -, RW -	Perusahaan Swasta Nasional	KONSTRUKSI BANGUNAN DAN KAPAL	21.00/41.0/000004/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/3/2025	19.842.000,00	31/12/2025	10	3.307.000,00	16.535.000,00
5	GNANAKUMAR RAJAMANI	Perpanjangan	51959193	16887	12/02/2025	12	14/02/2025	11/03/2026	India	Z7649315	L	QUALITY CONTROL MANAGER	PROFESIONAL	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Bintan(Kab)	SINGATAC BINTAN PT.	JL. ASOKA LOT D8-9 BIE LOBAM, TELUK SASAH, BINTAN UTARA	PMA	INDUSTRI KAPAL/GALANGAN KAPAL	21.00/41.0/000005/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/3/2025	19.860.000,00	31/12/2025	10	3.310.000,00	16.550.000,00
6	TIRUPATHI RAO VANA	Perpanjangan	51903374	23198	26/02/2025	12	28/02/2025	28/02/2026	India	X4874844	L	MECHANICAL ENGINEER	ADVISOR/CONSULTANT	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Karimun(Kab)	PT. ALLBEST MARINE	Kawasan Bintang Industri II Lot D NO.56 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji	PMA	INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL	21.00/41.0/000006/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/3/2025	19.890.000,00	31/12/2025	10	3.315.000,00	16.575.000,00
7	XU JIAO	Perpanjangan	51962446	24180	28/02/2025	12	04/03/2025	04/03/2026	China	EG9149753	L	FINANCE MANAGER	MANAGER	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Lingga(Kab)	GLOBAL WORLDLYKEN INDONESIA PT	RUKO RAFFLESIA BUSINESS CENTRE BLOK G, Nomor 08	PMA	PEMBESARAN CRUSTACEA LAUT	21.00/41.0/000007/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/3/2025	19.944.000,00	31/12/2025	9	4.986.000,00	14.958.000,00
8	CHANDRASEKARAN SANKAR	Perpanjangan	52035570	35477	26/03/2025	12	04/04/2025	03/04/2026	India	Z6407159	L	COMMISSIONER	KOMISARIS	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Bintan(Kab)	SINGATAC BINTAN PT.	JL. ASOKA LOT D8-9 BIE LOBAM, TELUK SASAH, BINTAN UTARA	PMA	INDUSTRI KAPAL/GALANGAN KAPAL	21.00/41.0/000008/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/4/2025	20.178.000,00	31/12/2025	8	6.726.000,00	13.452.000,00
9	CHAI MIN POH	Perpanjangan	52035298	35565	26/03/2025	12	27/03/2025	19/04/2026	Malaysia	A55605430	L	MANAGER OPERASIONAL	MANAGER	Kepulauan Riau	Bintan(Kab), Tanjung Pinang(Kota)	BINTAN KARISMA PRATAMA, PT.	JL. KAMPUNG BLORENG, RT. 04 RW. 01, TEMBELING, KEC. TELUK BINTAN, KAB. BINTAN	Perusahaan Swasta Nasional	JASA PERTAMBANGAN UMUM	21.00/41.0/000009/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/4/2025	20.148.000,00	31/12/2025	9	5.037.000,00	15.111.000,00
10	KRISHNAMURTHY KOTIPALLI	Perpanjangan	52039452	44849	29/04/2025	12	03/05/2025	02/05/2026	India	X4486301	L	PRODUCTION ADVISOR	PROFESIONAL	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Bintan(Kab)	SINGATAC BINTAN PT.	JL. ASOKA LOT D8-9 BIE LOBAM, TELUK SASAH, BINTAN UTARA	PMA	INDUSTRI KAPAL/GALANGAN KAPAL	21.00/41.0/000011/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/5/2025	20.424.000,00	31/12/2025	7	8.510.000,00	11.914.000,00
11	VENKATA RAMANA BOMMANABOYANA	Perpanjangan	52058199	40242	17/04/2025	11	13/05/2025	12/04/2026	India	P1731861	L	DIREKTUR UTAMA	DIREKSI	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Bintan(Kab)	GOODWILL ENGINEERING AND INSPECTION PT	RUKO KING BUSINESS CENTRE, Blok C1, Nomor 09	PMA	JASA ANALISIS DAN TESTING	21.00/41.0/000010/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/5/2025	18.694.500,00	31/12/2025	7	7.789.375,00	10.905.125,00
12	SRINIVASA KONAR GOVINDARASU	Perpanjangan	52072264	45838	30/04/2025	12	15/05/2025	14/05/2026	India	R7733813	L	PRODUCTION MANAGER	MANAGER	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Karimun(Kab)	SINGA ENGINEERING SINDO PT.	RUKO MARINA CITY NO. 43 KEL TANJUNG RIAU, KEC. SEKUPANG	PMA	JASA PERBAIKAN KAPAL	21.00/41.0/000012/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/5/2025	20.370.000,00	31/12/2025	7	8.487.500,00	11.882.500,00
13	ROBERT CHARLES NORTON	Perpanjangan	52072295	49525	07/05/2025	12	19/05/2025	18/05/2026	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	129641292	L	SITE MANAGER	MANAGER	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Bintan(Kab)	PT BINTAN OFFSHORE MARINE CENTRE	LOT 3 BINTAN INDUSTRIAL ESTATE, KELURAHAN TELUK BINTAN, KECAMATAN SERI KUALA LOBAM	PMA	JASA PENUNJANG MIGAS	21.00/41.0/000013/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/6/2025	19.992.000,00	31/12/2025	7	8.330.000,00	11.662.000,00
14	SUTHAKAR KOTTAIMUTHU	Perpanjangan	52179616	51871	14/05/2025	12	18/05/2025	17/05/2026	India	V5765583	L	MATERIAL MANAGER	ADVISOR/CONSULTANT	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Karimun(Kab)	PT. ALLBEST MARINE	Kawasan Bintang Industri II Lot D NO.56 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji	PMA	INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL	21.00/41.0/000014/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/6/2025	20.034.000,00	31/12/2025	7	8.347.500,00	11.686.500,00
15	KOK SIN	Perpanjangan	52205719	57708	23/05/2025	12	10/06/2025	09/06/2026	Malaysia	A55498142	L	PRODUCTION SUPERVISOR	SUPERVISOR	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Bintan(Kab)	SINGATAC BINTAN PT.	JL. ASOKA LOT D8-9 BIE LOBAM, TELUK SASAH, BINTAN UTARA	PMA	INDUSTRI KAPAL/GALANGAN KAPAL	21.00/41.0/000015/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/6/2025	19.848.000,00	31/12/2025	6	9.924.000,00	9.924.000,00
16	KHONG CHEOW KOON	Perpanjangan	52122731	59365	27/05/2025	12	03/06/2025	02/06/2026	Malaysia	A58682943	L	PRODUCTION ADVISOR	PROFESIONAL	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Bintan(Kab)	SINGATAC BINTAN PT.	JL. ASOKA LOT D8-9 BIE LOBAM, TELUK SASAH, BINTAN UTARA	PMA	INDUSTRI KAPAL/GALANGAN KAPAL	21.00/41.0/000016/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/6/2025	19.668.000,00	31/12/2025	6	9.834.000,00	9.834.000,00
17	LAU CHENG YEN	Perpanjangan	52248804	67199	13/06/2025	12	11/06/2025	10/06/2026	Malaysia	A55852733	L	BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER	MANAGER	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Karimun(Kab)	KELASINDO MERIN PT.	KOMPLEK RUKO ACELLENCE BLOK A NO. 16 PASIR PUTIH BATAM CENTER	Perusahaan Swasta Nasional	JASA PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN POWER PLANT	21.00/41.0/000017/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/7/2025	19.332.000,00	31/12/2025	6	9.666.000,00	9.666.000,00
18	JAYAN PERIYASAMY PERIYASAMY RAMASAMY	Perpanjangan	52207871	72130	20/06/2025	12	30/06/2025	29/06/2026	India	Z4498302	L	MARKETING MANAGER	MANAGER	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Karimun(Kab)	PT. ALLBEST MARINE	Kawasan Bintang Industri II Lot D NO.56 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji	PMA	INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL	21.00/41.0/000018/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/7/2025	19.764.000,00	31/12/2025	6	9.882.000,00	9.882.000,00
19	CHEN TINGHONG	Perpanjangan	52279713	73545	24/06/2025	11	10/07/2025	09/06/2026	China	E81179894	L	DIREKTUR		Kepulauan Riau	Bintan(Kab), Tanjung Pinang(Kota)	BINTAN CELLULAR INDONESIA PT	KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) GALANG BATANG, RT 006, RW 003	PMA	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	21.00/41.0/000019/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/7/2025	17.869.500,00	31/12/2025	5	10.423.875,00	7.445.625,00
20	GAO ZHONGYOU	Perpanjangan	52279714	73550	24/06/2025	12	10/07/2025	09/07/2026	China	EP5663058	L	KOMISARIS		Kepulauan Riau	Bintan(Kab), Tanjung Pinang(Kota)	BINTAN CELLULAR INDONESIA PT	KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) GALANG BATANG, RT 006, RW 003	PMA	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	21.00/41.0/000020/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/7/2025	19.494.000,00	31/12/2025	5	11.371.500,00	8.122.500,00
21	ALMIR HIDIC	Perpanjangan	52304846	75616	26/06/2025	12	08/07/2025	07/07/2026	Bosnia and Herzegovina	B3010884	L	OPERATIONS MANAGER	MANAGER	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Karimun(Kab)	GLOBAL FOOD SERVICES. PT	KOMPLEK ORCHID BUSINESS CENTER BLOK C2 NO. 5 BATAM CENTRE	PMA	JASA BOGA	21.00/41.0/000021/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/7/2025	19.728.000,00	31/12/2025	5	11.508.000,00	8.220.000,00
22	NAGARAJAN NATESAN	Perpanjangan	52306033	78082	04/07/2025	12	07/07/2025	06/07/2026	India	Z4911631	L	DIRECTOR	DIREKSI	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Karimun(Kab)	NAGA ENGINEERING INDONESIA PT	KOMPLEK RUKO CIPTA GRANDCITY, Blok H, Nomor 100	PMA	INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL	21.00/41.0/000022/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/8/2025	19.626.000,00	31/12/2025	5	11.448.500,00	8.177.500,00
23	LIM SEOW TIEN	Perpanjangan	52291154	81190	10/07/2025	12	21/07/2025	20/07/2026	Singapore	K5077061R	L	OPERATION MANAGER	MANAGER	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Bintan(Kab), Karimun(Kab)	PT. MEGA SYNERGY POWERINDO	Ruko Panbil Blok B No. 12B Lt 3, Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk, Batam	Perusahaan Swasta Nasional	JASA KONSTRUKSI	21.00/41.0/000023/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/8/2025	19.674.000,00	31/12/2025	5	11.476.500,00	8.197.500,00
24	JOHN GERARD OKEEFFE	Perpanjangan	52304183	88451	22/07/2025	12	10/08/2025	09/08/2026	Ireland	PR3800720	L	DIREKTUR	DIREKSI	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Karimun(Kab)	TARPON ENERGY SERVICES INDONESIA PT	CITRA BUANA INDUSTRIAL PARK I BLOK B NO. 07 KEL. KAMPUNG SERAYA, BATAM	PMA	JASA PENUNJANG MIGAS	21.00/41.0/000024/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/8/2025	19.734.000,00	31/12/2025	4	13.156.000,00	6.578.000,00
25	MATSUYUKI URANO	Perpanjangan	52426739	89321	23/07/2025	12	21/08/2025	20/08/2026	Japan	TT3764198	L	ENGINEERING MANAGER	MANAGER	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Batam(Kota)	RUBYCON INDONESIA	JL. GAHARU LOT 222 - 226 BIP MUKA KUNING BATAM	Perusahaan Swasta Asing	INDUSTRI KOMPONEN ELEKTRONIKA	21.00/41.0/000025/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/8/2025	19.764.000,00	31/12/2025	4	13.176.000,00	6.588.000,00
26	HYUNCHUL PARK	Perpanjangan	52427587	90738	24/07/2025	12	29/08/2025	28/08/2026	Korea, Republic of	M34022501	L	DIREKTUR		Kepulauan Riau	Batam(Kota), Batam(Kota)	EMTECH INTERNATIONAL INDONESIA PT	KAWASAN INDUSTRI TUNAS KABIL TYPE 7-D	PMA	IP TEMBAKAU DAN BUMBU ROKOK	21.00/41.0/000026/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/8/2025	19.740.000,00	31/12/2025	4	13.160.000,00	6.580.000,00
27	SUI XINPENG	Perpanjangan	52399176	91910	28/07/2025	12	29/08/2025	28/08/2026	China	EP3711400	L	GENERAL MANAGER		Kepulauan Riau	Bintan(Kab), Bintan(Kab)	PRIGRAND BINTAN INDONESIA, PT	KP GALANG BATANG, RT 005, RW 003	PMA	REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	21.00/41.0/000027/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/8/2025	19.350.000,00	31/12/2025	4	12.900.000,00	6.450.000,00
28	CHOW KA KI	Perpanjangan	52398897	91913	28/07/2025	12	23/08/2025	22/08/2026	China	K05625536	L	PRODUCTION MANAGER	MANAGER	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Batam(Kota)	PT SIMATELEX MANUFACTORY BATAM	JALAN BERINGIN, BATAMINDO INDUSTRIAL PARK, Blok LOT332-334	PMA	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK	21.00/41.0/000028/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/8/2025	19.734.000,00	31/12/2025	4	13.156.000,00	6.578.000,00
29	YANG ZHONGKUI	Perpanjangan	52403377	95017	01/08/2025	12	04/08/2025	03/08/2026	China	EJ6004095	L	ELECTRICAL ENGINEER	PROFESIONAL	Kepulauan Riau	Bintan(Kab), Bintan(Kab)	BINTAN ALUMINA INDONESIA	JL. RAJA ALI HAJI KM. 58 DS. GUNUNG KIJANG KEC. GUNUNG KIJANG KAB. BINTAN	Perusahaan Swasta Nasional	INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI	21.00/41.0/000031/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/8/2025	19.440.000,00	31/12/2025	4	12.960.000,00	6.480.000,00

NO	Nama TKA	Tipe	Barcode Pengesahan RPTKA	Nomor Pengesahan RPTKA	Tanggal Terbit	Jangka Waktu	Berlaku Mulai	Berlaku Sampai	Warga Negara	Nomor Paspor	Jenis Kelamin	Jabatan	Level Jabatan	Provinsi Penempatan	Kabupaten Penempatan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Status Badan Usaha	Sektor Usaha	STBP	Nilai	Tanggal akhir tahun anggaran 2025	Perhitungan Bulan	Pendapatan IMTA diterima Dimuka	Pendapatan Imta Tahun Berjalan (LO)
30	LIANG JIAN	Perpanjangan	52403099	94999	01/08/2025	12	09/08/2025	08/08/2026	China	EJ1578490	L	ELECTRICAL ENGINEER	PROFESIONAL	Kepulauan Riau	Bintan(Kab), Bintan(Kab)	BINTAN ALUMINA INDONESIA	JL. RAJA ALI HAJI KM. 58 DS. GUNUNG KIJANG KEC. GUNUNG KIJANG KAB. BINTAN	Perusahaan Swasta Nasional	INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI	21.00/41.0/000032/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/8/2025	19.440.000,00	31/12/2025	4	12.960.000,00	6.480.000,00
31	ZHAO CHUANGUO	Perpanjangan	52403600	95220	01/08/2025	12	04/08/2025	03/08/2026	China	EB6935729	L	PRODUCTION ENGINEER	PROFESIONAL	Kepulauan Riau	Bintan(Kab), Bintan(Kab)	BINTAN ALUMINA INDONESIA	JL. RAJA ALI HAJI KM. 58 DS. GUNUNG KIJANG KEC. GUNUNG KIJANG KAB. BINTAN	Perusahaan Swasta Nasional	INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI	21.00/41.0/000033/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/8/2025	19.440.000,00	31/12/2025	4	12.960.000,00	6.480.000,00
32	LIN JIBO	Perpanjangan	52450546	95213	01/08/2025	12	09/08/2025	08/08/2026	China	EH1874700	L	MECHANICAL ENGINEER	PROFESIONAL	Kepulauan Riau	Bintan(Kab), Bintan(Kab)	BINTAN ALUMINA INDONESIA	JL. RAJA ALI HAJI KM. 58 DS. GUNUNG KIJANG KEC. GUNUNG KIJANG KAB. BINTAN	Perusahaan Swasta Nasional	INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI	21.00/41.0/000034/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/8/2025	19.440.000,00	31/12/2025	4	12.960.000,00	6.480.000,00
33	JIANG SHAOPING	Perpanjangan	52403524	95206	01/08/2025	12	03/08/2025	02/08/2026	China	EJ5450726	L	MECHANICAL ENGINEER	PROFESIONAL	Kepulauan Riau	Bintan(Kab), Bintan(Kab)	BINTAN ALUMINA INDONESIA	JL. RAJA ALI HAJI KM. 58 DS. GUNUNG KIJANG KEC. GUNUNG KIJANG KAB. BINTAN	Perusahaan Swasta Nasional	INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI	21.00/41.0/000035/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/8/2025	19.440.000,00	31/12/2025	4	12.960.000,00	6.480.000,00
34	ZHANG HAIPING	Perpanjangan	52403404	95196	01/08/2025	12	09/08/2025	08/08/2026	China	EJ0979920	L	PRODUCTION ENGINEER	PROFESIONAL	Kepulauan Riau	Bintan(Kab), Bintan(Kab)	BINTAN ALUMINA INDONESIA	JL. RAJA ALI HAJI KM. 58 DS. GUNUNG KIJANG KEC. GUNUNG KIJANG KAB. BINTAN	Perusahaan Swasta Nasional	INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI	21.00/41.0/000037/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/8/2025	19.440.000,00	31/12/2025	4	12.960.000,00	6.480.000,00
35	SUN HENGWEN	Perpanjangan	52403380	95011	01/08/2025	12	11/08/2025	10/08/2026	China	EK0534345	L	MECHANICAL ENGINEER	PROFESIONAL	Kepulauan Riau	Bintan(Kab), Bintan(Kab)	BINTAN ALUMINA INDONESIA	JL. RAJA ALI HAJI KM. 58 DS. GUNUNG KIJANG KEC. GUNUNG KIJANG KAB. BINTAN	Perusahaan Swasta Nasional	INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI	21.00/41.0/000038/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/8/2025	19.440.000,00	31/12/2025	4	12.960.000,00	6.480.000,00
36	ZHAO JINHAO	Perpanjangan	52403322	94994	01/08/2025	12	11/08/2025	10/08/2026	China	EK4945830	L	MECHANICAL ENGINEER	PROFESIONAL	Kepulauan Riau	Bintan(Kab), Bintan(Kab)	BINTAN ALUMINA INDONESIA	JL. RAJA ALI HAJI KM. 58 DS. GUNUNG KIJANG KEC. GUNUNG KIJANG KAB. BINTAN	Perusahaan Swasta Nasional	INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI	21.00/41.0/000039/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/8/2025	19.440.000,00	31/12/2025	4	12.960.000,00	6.480.000,00
37	SONG ZHAOBO	Perpanjangan	52403100	95001	01/08/2025	12	09/08/2025	08/08/2026	China	EG9494317	L	PRODUCTION ENGINEER	PROFESIONAL	Kepulauan Riau	Bintan(Kab), Bintan(Kab)	BINTAN ALUMINA INDONESIA	JL. RAJA ALI HAJI KM. 58 DS. GUNUNG KIJANG KEC. GUNUNG KIJANG KAB. BINTAN	Perusahaan Swasta Nasional	INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI	21.00/41.0/000041/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/8/2025	19.440.000,00	31/12/2025	4	12.960.000,00	6.480.000,00
38	JIANG GUOTAO	Perpanjangan	52439489	95200	01/08/2025	12	09/08/2025	08/08/2026	China	ED7658921	L	MECHANICAL ENGINEER	PROFESIONAL	Kepulauan Riau	Bintan(Kab), Bintan(Kab)	BINTAN ALUMINA INDONESIA	JL. RAJA ALI HAJI KM. 58 DS. GUNUNG KIJANG KEC. GUNUNG KIJANG KAB. BINTAN	Perusahaan Swasta Nasional	INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI	21.00/41.0/000042/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/8/2025	19.440.000,00	31/12/2025	4	12.960.000,00	6.480.000,00
39	WANG ZHAOLONG	Perpanjangan	52403403	95024	01/08/2025	12	09/08/2025	08/08/2026	China	EF5522394	L	MECHANICAL MANAGER	MANAGER	Kepulauan Riau	Bintan(Kab), Bintan(Kab)	BINTAN ALUMINA INDONESIA	JL. RAJA ALI HAJI KM. 58 DS. GUNUNG KIJANG KEC. GUNUNG KIJANG KAB. BINTAN	Perusahaan Swasta Nasional	INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI	21.00/41.0/000043/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/8/2025	19.440.000,00	31/12/2025	4	12.960.000,00	6.480.000,00
40	DONG YANAN	Perpanjangan	52403267	95013	01/08/2025	12	11/08/2025	10/08/2026	China	EK5447563	L	MATERIAL MANAGER	MANAGER	Kepulauan Riau	Bintan(Kab), Bintan(Kab)	BINTAN ALUMINA INDONESIA	JL. RAJA ALI HAJI KM. 58 DS. GUNUNG KIJANG KEC. GUNUNG KIJANG KAB. BINTAN	Perusahaan Swasta Nasional	INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI	21.00/41.0/000045/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/8/2025	19.440.000,00	31/12/2025	4	12.960.000,00	6.480.000,00
41	ZHANG YU	Perpanjangan	52403101	95002	01/08/2025	12	09/08/2025	08/08/2026	China	EF1191540	L	MECHANICAL MANAGER	MANAGER	Kepulauan Riau	Bintan(Kab), Bintan(Kab)	BINTAN ALUMINA INDONESIA	JL. RAJA ALI HAJI KM. 58 DS. GUNUNG KIJANG KEC. GUNUNG KIJANG KAB. BINTAN	Perusahaan Swasta Nasional	INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI	21.00/41.0/000046/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/8/2025	19.440.000,00	31/12/2025	4	12.960.000,00	6.480.000,00
42	XIE YIFENG	Perpanjangan	52403599	95358	01/08/2025	12	09/08/2025	08/08/2026	China	EJ1575514	L	PRODUCTION ENGINEER	SUPERVISOR	Kepulauan Riau	Bintan(Kab), Bintan(Kab)	BINTAN ALUMINA INDONESIA	JL. RAJA ALI HAJI KM. 58 DS. GUNUNG KIJANG KEC. GUNUNG KIJANG KAB. BINTAN	Perusahaan Swasta Nasional	INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI	21.00/41.0/000047/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/8/2025	19.440.000,00	31/12/2025	4	12.960.000,00	6.480.000,00
43	GUO MIN	Perpanjangan	52403598	95364	01/08/2025	12	09/08/2025	08/08/2026	China	EF1546634	L	MECHANICAL MANAGER	MANAGER	Kepulauan Riau	Bintan(Kab), Bintan(Kab)	BINTAN ALUMINA INDONESIA	JL. RAJA ALI HAJI KM. 58 DS. GUNUNG KIJANG KEC. GUNUNG KIJANG KAB. BINTAN	Perusahaan Swasta Nasional	INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI	21.00/41.0/000048/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/8/2025	19.440.000,00	31/12/2025	4	12.960.000,00	6.480.000,00
44	GAO YING	Perpanjangan	52403597	95373	01/08/2025	12	09/08/2025	08/08/2026	China	EG8844647	L	PRODUCTION MANAGER	ADVISOR/CONSULTANT	Kepulauan Riau	Bintan(Kab), Bintan(Kab)	BINTAN ALUMINA INDONESIA	JL. RAJA ALI HAJI KM. 58 DS. GUNUNG KIJANG KEC. GUNUNG KIJANG KAB. BINTAN	Perusahaan Swasta Nasional	INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI	21.00/41.0/000049/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/8/2025	19.440.000,00	31/12/2025	4	12.960.000,00	6.480.000,00
45	TIAN YUPAN	Perpanjangan	52403381	95005	01/08/2025	12	11/08/2025	10/08/2026	China	EK4003834	L	MECHANICAL ENGINEER	PROFESIONAL	Kepulauan Riau	Bintan(Kab), Bintan(Kab)	BINTAN ALUMINA INDONESIA	JL. RAJA ALI HAJI KM. 58 DS. GUNUNG KIJANG KEC. GUNUNG KIJANG KAB. BINTAN	Perusahaan Swasta Nasional	INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI	21.00/41.0/000050/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/8/2025	19.440.000,00	31/12/2025	4	12.960.000,00	6.480.000,00
46	VIJAYAKUMAR RAMACHANDRAN	Perpanjangan	52427428	93184	30/07/2025	12	27/08/2025	26/08/2026	India	V1411677	L	MANAGEMENT CONSULTING PROFESSIONAL	PROFESIONAL	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Bintan(Kab), Karimun(Kab)	GOODWILL ENGINEERING AND INSPECTION PT	RUKO KING BUSINESS CENTRE, Blok C1, Nomor 09	PMA	JASA ANALISIS DAN TESTING	21.00/41.0/000051/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/8/2025	19.836.000,00	31/12/2025	4	13.224.000,00	6.612.000,00
47	SRINIVAS REDDY KAMBALAPALLY	Perpanjangan	52427427	93182	30/07/2025	12	24/08/2025	23/08/2026	India	Z8313375	L	REASEARCH & DEVELOPMENT MANAGER	MANAGER	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Bintan(Kab), Karimun(Kab)	GOODWILL ENGINEERING AND INSPECTION PT	RUKO KING BUSINESS CENTRE, Blok C1, Nomor 09	PMA	JASA ANALISIS DAN TESTING	21.00/41.0/000052/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/8/2025	19.836.000,00	31/12/2025	4	13.224.000,00	6.612.000,00
48	JAGATHESWARAN ATHINARAYANAN	Perpanjangan	52403633	95205	01/08/2025	12	22/08/2025	21/08/2026	India	I0359624	L	SITE ENGINEER	PROFESIONAL	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Bintan(Kab)	PT SUTAN & HARITZ	GRIYA SAGULUNG PERMAI, Blok G, Nomor 13, RT -, RW -	Perusahaan Swasta Nasional	KONSTRUKSI BANGUNAN DAN KAPAL	21.00/41.0/000053/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/9/2025	19.968.000,00	31/12/2025	4	13.312.000,00	6.656.000,00
49	KARTHICK RAJARAM	Perpanjangan	52403635	95375	01/08/2025	12	17/09/2025	16/09/2026	India	V1417467	L	SITE PROJECT CONTROL MANAGER		Kepulauan Riau	Batam(Kota), Bintan(Kab), Karimun(Kab)	PT SUTAN & HARITZ	GRIYA SAGULUNG PERMAI, Blok G, Nomor 13, RT -, RW -	Perusahaan Swasta Nasional	KONSTRUKSI BANGUNAN DAN KAPAL	21.00/41.0/000054/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/9/2025	19.968.000,00	31/12/2025	3	14.976.000,00	4.992.000,00
50	KISHORE BABU DALIPARTI	Perpanjangan	52488064	99016	07/08/2025	12	07/09/2025	06/09/2026	India	Z4836947	L	PROJECT MANAGER	PROFESIONAL	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Bintan(Kab)	SINGATAC BINTAN PT.	JL. ASOKA LOT D8-9 BIE LOBAM, TELUK SASAH, BINTAN UTARA	PMA	INDUSTRI KAPAL/GALANGAN KAPAL	21.00/41.0/000055/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/9/2025	19.854.000,00	31/12/2025	3	14.890.500,00	4.963.500,00
51	CHINNATHAMBI GOVINDHASAMY	Perpanjangan	52487683	102978	13/08/2025	12	07/09/2025	06/09/2026	India	I0363828	L	PRODUCTION ADVISOR	PROFESIONAL	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Bintan(Kab)	SINGATAC BINTAN PT.	JL. ASOKA LOT D8-9 BIE LOBAM, TELUK SASAH, BINTAN UTARA	PMA	INDUSTRI KAPAL/GALANGAN KAPAL	21.00/41.0/000056/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/9/2025	19.902.000,00	31/12/2025	3	14.926.500,00	4.975.500,00
52	GOPAL ARIKRISHNAN	Perpanjangan	52426539	114799	01/09/2025	12	09/09/2025	08/09/2026	India	Z7843484	L	DIREKTUR UTAMA	DIREKSI	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Bintan(Kab), Bintan(Kab), Karimun(Kab), Karimun(Kab)	SUN MARINE ENGINEERING PT	RUKO TRIKARSA EKUALITA, Blok B, Nomor 6	PMA	JASA INSPEKSI	21.00/41.0/000057/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/10/2025	19.962.000,00	31/12/2025	3	14.971.500,00	4.990.500,00
53	CHEN SHIWEN	Perpanjangan	52553584	115144	02/09/2025	12	11/10/2025	10/10/2026	China	ED6228420	L	PRODUCTION ADVISOR	PROFESIONAL	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Bintan(Kab)	SINGATAC BINTAN PT.	JL. ASOKA LOT D8-9 BIE LOBAM, TELUK SASAH, BINTAN UTARA	PMA	INDUSTRI KAPAL/GALANGAN KAPAL	21.00/41.0/000058/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/10/2025	19.962.000,00	31/12/2025	2	16.635.000,00	3.327.000,00
54	ANBARASAN THIRUGNANASAM BANDAM	Perpanjangan	52493373	116088	03/09/2025	12	16/09/2025	15/09/2026	India	V6155755	L	SITE MANAGER		Kepulauan Riau	Batam(Kota), Karimun(Kab)	PT. ALLBEST MARINE	Kawasan Bintang Industri II Lot D NO.56 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji	PMA	INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL	21.00/41.0/000059/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/10/2025	19.908.000,00	31/12/2025	3	14.931.000,00	4.977.000,00
55	MANIMARAN SAMINATHAN	Perpanjangan	52504104	116084	03/09/2025	12	20/09/2025	19/09/2026	India	V9533523	L	TECHNICAL MANAGER		Kepulauan Riau	Batam(Kota), Karimun(Kab)	PT. ALLBEST MARINE	Kawasan Bintang Industri II Lot D NO.56 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji	PMA	INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL	21.00/41.0/000060/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/10/2025	19.908.000,00	31/12/2025	3	14.931.000,00	4.977.000,00
56	LOO SHENG RONG JASPER	Perpanjangan	52490908	116098	03/09/2025	12	16/09/2025	15/09/2026	Singapore	K2421681E	L	GENERAL MANAGER		Kepulauan Riau	Batam(Kota), Karimun(Kab)	PT. ALLBEST MARINE	Kawasan Bintang Industri II Lot D NO.56 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji	PMA	INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL	21.00/41.0/000061/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/10/2025	19.908.000,00	31/12/2025	3	14.931.000,00	4.977.000,00
57	PLECAS TROY ANTON	Perpanjangan	52525545	118633	09/09/2025	12	14/10/2025	13/10/2026	Australia	PB5697101	L	SITE MANAGER	PROFESIONAL	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Bintan(Kab)	PT BINTAN OFFSHORE MARINE CENTRE	LOT 3 BINTAN INDUSTRIAL ESTATE, KELURAHAN TELUK BINTAN, KECAMATAN SERI KUALA LOBAM	PMA	JASA PENUNJANG MIGAS	21.00/41.0/000062/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/10/2025	19.836.000,00	31/12/2025	2	16.530.000,00	3.306.000,00
58	PANNEER SELVAM CHANDIRAN	Perpanjangan	52590307	119100	09/09/2025	12	30/10/2025	29/10/2026	India	U0077246	L	PRODUCTION ADVISOR	PROFESIONAL	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Bintan(Kab)	SINGATAC BINTAN PT.	JL. ASOKA LOT D8-9 BIE LOBAM, TELUK SASAH, BINTAN UTARA	PMA	INDUSTRI KAPAL/GALANGAN KAPAL	21.00/41.0/000063/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/10/2025	19.908.000,00	31/12/2025	2	16.590.000,00	3.318.000,00
59	TAEUK KIM	Perpanjangan	52589577	120317	11/09/2025	6	14/10/2025	13/04/2026	Korea, Republic of	M28798184	L	QUALITY CONTROL MANAGER	MANAGER	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Karimun(Kab)	PERTAMA PACIFIC SHIPYARD PT	JL.KUDA LAUT BELAKANG DEPNAKER NO NO.1A, TANJUNG SENGKUANG	PMA	INDUSTRI KAPAL / PERAHU	21.00/41.0/000064/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/10/2025	9.957.000,00	31/12/2025	2	8.297.500,00	1.659.500,00
60	TEO ZHI MING RONALD	Perpanjangan	52504107	126210	24/09/2025	12	07/10/2025	06/10/2026	Singapore	K3241310Z	L	PROCUREMENT MANAGER	ADVISOR/CONSULTANT	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Karimun(Kab)	PT. ALLBEST MARINE	Kawasan Bintang Industri II Lot D NO.56 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji	PMA	INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL	21.00/41.0/000065/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/10/2025	20.022.000,00	31/12/2025	2	16.685.000,00	3.337.000,00
61	RIXON CHEENATH SEBASTIAN	Perpanjangan	52575729	125938	24/09/2025	12	30/09/2025	29/09/2026	India	C6134456	L	TECHNICAL ADVISOR	ADVISOR/CONSULTANT	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Karimun(Kab)	TARPON ENERGY SERVICES INDONESIA PT	CITRA BUANA INDUSTRIAL PARK I BLOK B NO. 07 KEL. KAMPUNG SERAYA, BATAM	PMA	JASA PENUNJANG MIGAS	21.00/41.0/000066/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/10/2025	20.088.000,00	31/12/2025	3	15.066.000,00	5.022.000,00
62	SMIJITH KOODATHIL	Perpanjangan	52575730	133054	03/10/2025	12	12/10/2025	30/09/2026	India	ZA319335	L	MECHANICAL ENGINEER ADVISOR	ADVISOR/CONSULTANT	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Karimun(Kab)	TARPON ENERGY SERVICES INDONESIA PT	CITRA BUANA INDUSTRIAL PARK I BLOK B NO. 07 KEL. KAMPUNG SERAYA, BATAM	PMA	JASA PENUNJANG MIGAS	21.00/41.0/000067/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/11/2025	20.160.000,00	31/12/2025	2	16.800.000,00	3.360.000,00

NO	Nama TKA	Tipe	Barcode Pengesahan RPTKA	Nomor Pengesahan RPTKA	Tanggal Terbit	Jangka Waktu	Berlaku Mulai	Berlaku Sampai	Warga Negara	Nomor Paspor	Jenis Kelamin	Jabatan	Level Jabatan	Provinsi Penempatan	Kabupaten Penempatan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Status Badan Usaha	Sektor Usaha	STBP	Nilai	Tanggal akhir tahun anggaran 2025	Perhitungan Bulan	Pendapatan IMTA diterima Dimuka	Pendapatan Imta Tahun Berjalan (LO)
63	ANG AH NUI	Perpanjangan	52648295	137134	09/10/2025	12	01/11/2025	31/10/2026	Singapore	K3094692A	L	MANAGING DIRECTOR	DIREKSI	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Tanjungpinang(Kota)	PT. ASL SHIPYARD INDONESIA	JLN. BRIGJEND KATAMSO, TANJUNG UNCANG	PMA	INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL	21.00/41.0/000068/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/11/2025	19.674.000,00	31/12/2025	1	18.034.500,00	1.639.500,00
64	SAKKARAI MOHAMMADHU RAJA MOHAMED	Perpanjangan	52649757	137139	09/10/2025	12	02/11/2025	01/11/2026	India	C2146120	L	PRODUCTION MANAGER	MANAGER	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Karimun(Kab)	SINGA ENGINEERING SINDO PT.	RUKO MARINA CITY NO. 43 KEL TANJUNG RIAU, KEC. SEKUPANG	PMA	JASA PERBAIKAN KAPAL	21.00/41.0/000069/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/11/2025	20.070.000,00	31/12/2025	1	18.397.500,00	1.672.500,00
65	AMMASI ALSO KNOWN AS SATHAIAH CHANDRAN	Perpanjangan	52648690	137387	10/10/2025	12	28/10/2025	27/10/2026	India	Z5300161	L	MACHINERY MAINTENANCE SPECIALIST	ADVISOR/CONSULTANT	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Karimun(Kab)	SINGA ENGINEERING SINDO PT.	RUKO MARINA CITY NO. 43 KEL TANJUNG RIAU, KEC. SEKUPANG	PMA	JASA PERBAIKAN KAPAL	21.00/41.0/000070/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/11/2025	20.070.000,00	31/12/2025	2	16.725.000,00	3.345.000,00
66	CORNELIS LEONARDUS GERARDUS VAN BEERS	Perpanjangan	52652912	139938	14/10/2025	12	01/12/2025	30/11/2026	Netherlands, Kingdom of the	BYRCD7P85	L	QUALITY CONTROL MANAGER	MANAGER	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Bintan(Kab)	PT. BARUNA MULTIDAYA	JL.DUYUNG KOMP.HARBOURBAY MALL BLOK H NO.29 SUNGAI JODOH BATU AMPAR BATAM	PMDN	JASA TRANSPORTASI	21.00/41.0/000071/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/11/2025	20.064.000,00	31/12/2025	0	20.064.000,00	-
67	KANNADASAN JESIN KUMAR	Perpanjangan	52634076	139934	14/10/2025	12	27/10/2025	26/10/2026	India	C9795399	L	PROJECT ENGINEER	PROFESIONAL	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Bintan(Kab)	SINGATAC BINTAN PT.	JL. ASOKA LOT D8-9 BIE LOBAM, TELUK SASAH, BINTAN UTARA	PMA	INDUSTRI KAPAL/GALANGAN KAPAL	21.00/41.0/000072/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/11/2025	20.064.000,00	31/12/2025	2	16.720.000,00	3.344.000,00
68	SANTIAGO BENNY	Perpanjangan	52647601	143242	20/10/2025	12	18/11/2025	17/11/2026	India	W0826735	L	QUALITY CONTROL MANAGER	MANAGER	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Karimun(Kab)	SINGA ENGINEERING SINDO PT.	RUKO MARINA CITY NO. 43 KEL TANJUNG RIAU, KEC. SEKUPANG	PMA	JASA PERBAIKAN KAPAL	21.00/41.0/000073/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/11/2025	20.064.000,00	31/12/2025	1	18.392.000,00	1.672.000,00
69	YANG XIAOYAN	Perpanjangan	52641572	143250	20/10/2025	12	20/11/2025	19/11/2026	China	EM2976952	P	OPERATIONS MANAGER	PROFESIONAL	Kepulauan Riau	Bintan(Kab), Tanjungpinang(Kota)	PT HOH XIL CATERING	JL. TUGU PAHLAWAN NOMOR 34 KEL. BUKIT CERMIN KEC. TANJUNG PINANG BARAT KOTA TANJUNG PINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU 29111	PMA	RESTAURANT	21.00/41.0/000074/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/11/2025	19.692.000,00	31/12/2025	1	18.051.000,00	1.641.000,00
70	JIANG JINZHE	Perpanjangan	52641571	143241	20/10/2025	12	20/11/2025	19/11/2026	China	ED5133401	L	CHEF	PROFESIONAL	Kepulauan Riau	Bintan(Kab), Tanjungpinang(Kota)	PT HOH XIL CATERING	JL. TUGU PAHLAWAN NOMOR 34 KEL. BUKIT CERMIN KEC. TANJUNG PINANG BARAT KOTA TANJUNG PINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU 29111	PMA	RESTAURANT	21.00/41.0/000075/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/11/2025	19.692.000,00	31/12/2025	1	18.051.000,00	1.641.000,00
71	KANNAN ALAGARSAMY	Perpanjangan	52665106	156671	11/11/2025	12	23/11/2025	22/11/2026	India	V6144609	L	TECHNICAL MANAGER	MANAGER	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Karimun(Kab)	PT. ALLBEST MARINE	Kawasan Bintang Industri II Lot D NO.56 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji	PMA	INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL	21.00/41.0/000076/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/12/2025	20.202.000,00	31/12/2025	1	18.518.500,00	1.683.500,00
72	HANNAH JOYCE GLATHAR	Perpanjangan	52652498	160481	18/11/2025	12	14/01/2026	13/01/2027	United States of America	567861805	P	TOUR MANAGER	MANAGER	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Karimun(Kab)	ISLAND CONNECTIONS INTERNATIONAL, PT	ruko imperium superblok blok B no 35 dan 36 kelurahan taman , kecamatan baloi . Kota Batam	Perusahaan Swasta Nasional	JASA HIBURAN, RESTAURANT DAN REKREASI	21.00/41.0/000077/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/12/2025	20.280.000,00	31/12/2025	0	20.280.000,00	-
73	REJOY CHEENATH SEBASTIAN	Perpanjangan	52691467	176178	16/12/2025	6	22/12/2025	21/06/2026	India	AE423400	L	MECHANICAL ENGINEERING ADVISOR	ADVISOR/CONSULTANT	Kepulauan Riau	Batam(Kota), Karimun(Kab)	TARPON ENERGY SERVICES INDONESIA PT	CITRA BUANA INDUSTRIAL PARK I BLOK B NO. 07 KEL. KAMPUNG SERAYA, BATAM	PMA	JASA PENUNJANG MIGAS	21.00/41.0/000078/STBP/2.07.3.32.0.00.07.0000/12/2025	10.098.000,00	31/12/2025	0	10.098.000,00	-
TOTAL																					**1.421.133.000,00**			**900.368.250,00**	**520.764.750,00**

LAMPIRAN 8B

REKAPITULASI PENERIMAAN DITERIMA DIMUKA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

A. Sumber dari Pendapatan Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD (KSP Kawasn Gurindam 12)

No	Uraian	Jumlah LRA	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Akhir Sewa	Periode tahun anggaran 2025	Perhitungan Bulan	Pendapatan Sewa Tahun Berjalan (LO)	Pendapatan Sewa diterima dimuka	Keterangan
1	Pembayaran Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupa tanah dan fasilitas di Kawasan Guridam 12 Kota Tanjungpinang oleh PT Sadaap Unik Nuansa (Blok Dingkis) (BKAD)	28.000.000,00	29/12/2025	29/12/2055	31/12/2025	-	0,00	28.000.000,00	kontribusi dibayar per tahun tanggal 20 januari
2	Pembayaran Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupa tanah dan fasilitas di Kawasan Guridam 12 Kota Tanjungpinang oleh CV. Pribumi Jaya Mandiri (Blok Dugong) (BKAD)	26.393.750,00	29/12/2025	29/12/2055	31/12/2025	-	0,00	26.393.750,00	kontribusi dibayar per tahun tanggal 20 januari
3	Pembayaran Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupa tanah dan fasilitas di Kawasan Guridam 12 Kota Tanjungpinang oleh PT. Sarana Anugrah Petra (Blok Napoleon) (BKAD)	28.800.000,00	29/12/2025	29/12/2055	31/12/2025	-	0,00	28.800.000,00	kontribusi dibayar per tahun tanggal 20 januari
4	Pembayaran Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupa tanah dan fasilitas di Kawasan Guridam 12 Kota Tanjungpinang oleh CV. Bintang Perkasa (Blok Gong Gong) (BKAD)	26.363.750,00	29/12/2025	29/12/2055	31/12/2025	-	0,00	26.363.750,00	kontribusi dibayar per tahun tanggal 20 januari
		109.557.500,00				**0,00**	**0,00**	**109.557.500,00**	

B. Sumber dari Pendapatan Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD (Kantin)

No	Uraian	Jumlah LRA	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Akhir Sewa	Periode tahun anggaran 2025	Perhitungan Bulan	Pendapatan Sewa Tahun Berjalan (LO)	Pendapatan Sewa diterima dimuka	Koreksi Ekuitas	Keterangan
1	Kantin 1 / Sri Mestika Yani (SMKN 5 TANJUNGPINANG)	1.631.700,00	01/09/2025	31/08/2026	31/12/2025	3	407.925,00	1.223.775,00		
2	Kantin 1 / Zata Amni (SMAN 7 BATAM)	4.150.000,00	01/09/2025	01/08/2026	31/12/2025	3	1.037.500,00	3.112.500,00		
3	Kantin 1 ROSMADIANA (SLBN KARIMUN)	2.408.000,00	01/10/2025	01/09/2026	31/12/2025	2	401.333,33	2.006.666,67		
4	Kantin 1 NURHAYATI (SMAN 1 SERASAN)	1.092.000,00	02/01/2026	31/12/2026	31/12/2025	-	-	1.092.000,00		
5	Kantin 2 AISYAH (SMAN 1 SERASAN)	1.092.000,00	02/01/2026	31/12/2026	31/12/2025	-	-	1.092.000,00		
6	Kantin 3 ROHANA (SMAN 1 SERASAN)	1.092.000,00	02/01/2026	31/12/2026	31/12/2025	-	-	1.092.000,00		
7	Kantin 4 JUNITA (SMAN 1 SERASAN)	1.092.000,00	02/01/2026	31/12/2026	31/12/2025	-	-	1.092.000,00		
8	Kantin 5 DIRNA LISAWATI (SMAN 1 SERASAN)	1.092.000,00	02/01/2026	31/12/2026	31/12/2025	-	-	1.092.000,00		
9	Pengembalian Sewa Kantin 2024 (SMAN 1)	66.000.000,00							66.000.000,00	Pengembalian pendapatan kantin 2024
10	Kantin Ibu Zairah/Ibu Marlina (SMAN 1 Singkep)	6.592.500,00	01/01/2025	30/06/2025	31/12/2025		2.780.000,00	0,00	3.812.500,00	ada pembayaran sewa kantin periode juli-desember 2024
		86.242.200,00					**4.626.758,33**	**11.802.941,67**	**69.812.500,00**	

C. Sumber dari Pendapatan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan

No	Uraian	Jumlah LRA	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Akhir Sewa	Periode tahun anggaran 2025	Perhitungan Bulan	Pendapatan Sewa Tahun Berjalan (LO)	Pendapatan Sewa diterima dimuka	Keterangan
1	Penyewaan Lahan Tower Site SMKN 5 Batam oleh PT. Tower Bersama No. Tagihan : B/000.2.3.2/755.1/BKAD-SET/2025 (BKAD)	125.000.000,00	12/08/2025	12/08/2030	31/12/2025	4	8.333.333,33	116.666.666,67	Penyewaan lahan tiap tahun selama 5 tahun adalah 25.000.000,00 = (125.000.000,00 : 5)
		125.000.000,00					**8.333.333,33**	**116.666.666,67**	

D. Sumber dari Pendapatan Retribusi Pemakaian Ruangan

No	Uraian	Jumlah LRA	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Akhir Sewa	Periode tahun anggaran 2025	Perhitungan Bulan	Pendapatan Sewa Tahun Berjalan (LO)	Pendapatan Sewa diterima dimuka	Keterangan
1	Sewa Ruangan Asrama Haji (BKAD)	1.229.900.000,00	-	-	-	-	1.229.900.000,00	-	Sewa Kamar dan Aula Dibayar per pesanan hari
2	Sewa Ruangan ATM BRK Syariah Lokasi Dompak (BKAD)	21.000.000,00	26/11/2025	26/12/2025	31/12/2025	1	1.750.000,00	19.250.000,00	
3	Sewa Ruangan ATM BRK Syariah Lokasi Kantor Penghubung Jakarta (BKAD)	54.780.000,00	17/04/2025	16/04/2025	31/12/2025	8	36.520.000,00	18.260.000,00	
		1.305.680.000,00					**1.268.170.000,00**	**37.510.000,00**	

LAMPIRAN 8C

REKAPITULASI PENERIMAAN DITERIMA DIMUKA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sumber dari Pendapatan Retribusi Pemakaian Ruangan

No	Uraian	Jumlah LRA	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Akhir Sewa	Periode tahun anggaran 2025	Perhitungan Bulan	Pendapatan Sewa Tahun Berjalan (LO)	Pendapatan Sewa diterima dimuka	Koreksi Ekuitas	Keterangan
1	Sewa Ruangan ATM Bank BRK Syariah (Bappenda)	21.000.000,00	29/05/2025	29/05/2026	31/12/2025	7	12.250.000,00	8.750.000,00		
2	Sewa Ruangan ATM BJB (Bappeda)	21.000.000,00	20/07/2025	20/07/2026	31/12/2025	5	8.750.000,00	12.250.000,00		
3	Sewa Ruangan Foto Copy UPT Tanjungpinang (Bappenda)	7.200.000,00	01/11/2025	31/10/2026	31/12/2025	1	600.000,00	6.600.000,00		
4	Sewa Ruangan Kantin UPT PPD Tanjungpinang (Bappenda)	3.780.000,00	01/01/2025	31/07/2026	31/12/2025		3.780.000,00	-		Dibayar perbulan
		52.980.000,00					**25.380.000,00**	**27.600.000,00**	**-**	

LAMPIRAN 8D

REKAPITULASI PENERIMAAN DITERIMA DIMUKA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB

Sumber Pendapatan Retribusi Pemakaian Ruangan

No	Uraian	Jumlah LRA	Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Akhir Sewa	Periode tahun anggaran 2025	Perhitungan Bulan	Pendapatan Sewa Tahun Berjalan (LO)	Pendapatan Sewa diterima dimuka	Koreksi Ekuitas	Keterangan
1	Sewa Lahan Kantor Kas BRKS (RSUD Raja Ahmad Tabib)	74.949.600,00	10/01/2025	10/01/2027	31/12/2025	11	34.351.900,00	40.597.700,00		
2	Sewa Lahan ATM BRKS (RSUD Raja Ahmad Tabib)	48.000.000,00	10/01/2025	10/01/2027	31/12/2025	11	22.000.000,00	26.000.000,00		
		122.949.600,00					**56.351.900,00**	**66.597.700,00**	**-**	

LAMPIRAN 9

REKAPITULASI KEWAJIBAN JANGKA PENDEK ATAS UTANG BELANJA DAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA TAHUN 2025

NO	NAMA OPD	SISA KEWAJIBAN TAHUN 2024				SUB TOTAL	PENAMBAHAN UTANG 2025				SUB TOTAL	SALDO KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 2025				SUB TOTAL
		PEGAWAI	BARANG JASA	HIBAH	MODAL		PEGAWAI	BARANG JASA	HIBAH	MODAL		PEGAWAI	BARANG JASA	HIBAH	MODAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (8)+(9)+(10)+(11)	(13) = (3) + (8)	(14) = (4) + (9)	(15) = (5) + (10)	(16) = (6) + (11)	(17) = (7)+(12)
1	Dinas Pendidikan	0,00	20.710.600,00	0,00	35.322.201,20	56.032.801,20	1.358.356.568,00	1.951.218.480,27	0,00	8.114.855.898,80	11.424.430.947,07	1.358.356.568,00	1.971.929.080,27	0,00	8.150.178.100,00	11.480.463.748,27
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.149.747,00	0,00	49.950.000,00	1.651.099.747,00	0,00	1.601.149.747,00	0,00	49.950.000,00	1.651.099.747,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580.733.349,00	0,00	250.971.000,00	3.831.704.349,00	0,00	3.580.733.349,00	0,00	250.971.000,00	3.831.704.349,00
	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib (BLUD)	0,00	15.993.531.798,00	0,00	0,00	15.993.531.798,00	943.177.607,00	13.349.765.083,00	0,00	0,00	14.292.942.690,00	943.177.607,00	29.343.296.881,00	0,00	0,00	30.286.474.488,00
4	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (BLUD)	0,00	279.731.200,00	0,00	0,00	279.731.200,00	0,00	7.528.529.224,00	0,00	0,00	7.528.529.224,00	0,00	7.808.260.424,00	0,00	0,00	7.808.260.424,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.830.567.150,20	2.972.297.306,73	6.822.103.863,96	25.624.968.320,89	0,00	15.830.567.150,20	2.972.297.306,73	6.822.103.863,96	25.624.968.320,89
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	541.085.133,91	0,00	36.292.812,50	577.377.946,41	0,00	29.830.844.238,00	0,00	928.221.553,00	30.759.065.791,00	0,00	30.371.929.371,91	0,00	964.514.365,50	31.336.443.737,41
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.240.123,00	0,00	0,00	283.240.123,00	0,00	283.240.123,00	0,00	0,00	283.240.123,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.080.000,00	0,00	0,00	120.080.000,00	0,00	120.080.000,00	0,00	0,00	120.080.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.082.229,00	0,00	110.115.108,00	375.197.337,00	0,00	265.082.229,00	0,00	110.115.108,00	375.197.337,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.786.590,00	0,00	0,00	350.786.590,00	0,00	350.786.590,00	0,00	0,00	350.786.590,00
12	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584.492.001,00	0,00	157.264.800,00	2.741.756.801,00	0,00	2.584.492.001,00	0,00	157.264.800,00	2.741.756.801,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.893.500,00	0,00	116.422.350,00	170.315.850,00	0,00	53.893.500,00	0,00	116.422.350,00	170.315.850,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00
15	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.524.769,20	0,00	2.810.850.831,23	3.938.375.600,43	0,00	1.127.524.769,20	0,00	2.810.850.831,23	3.938.375.600,43
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119.212.130,00	0,00	0,00	4.119.212.130,00	0,00	4.119.212.130,00	0,00	0,00	4.119.212.130,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.027.548,00	0,00	0,00	1.121.027.548,00	0,00	1.121.027.548,00	0,00	0,00	1.121.027.548,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.581.001,00	0,00	97.435.800,00	1.287.016.801,00	0,00	1.189.581.001,00	0,00	97.435.800,00	1.287.016.801,00
20	Dinas Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.208.560,00	0,00	0,00	120.208.560,00	0,00	120.208.560,00	0,00	0,00	120.208.560,00
21	Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.318.954,00	0,00	33.189.000,00	204.507.954,00	0,00	171.318.954,00	0,00	33.189.000,00	204.507.954,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.562.340,00	273.178.928,00	0,00	402.741.268,00	0,00	129.562.340,00	273.178.928,00	0,00	402.741.268,00
23	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.753.784,00	0,00	0,00	1.831.753.784,00	0,00	1.831.753.784,00	0,00	0,00	1.831.753.784,00
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.425.540,00	0,00	7.195.606.800,00	7.623.032.340,00	0,00	427.425.540,00	0,00	7.195.606.800,00	7.623.032.340,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000.000,00	0,00	70.815.000,00	256.815.000,00	0,00	186.000.000,00	0,00	70.815.000,00	256.815.000,00
26	Biro Administrasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Biro Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Biro Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Biro Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Biro Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Biro Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.291.686,00	0,00	138.500.000,00	1.669.791.686,00	0,00	1.531.291.686,00	0,00	138.500.000,00	1.669.791.686,00
34	Sekretariat DPRD	0,00	538.945.400,00	0,00	0,00	538.945.400,00	0,00	938.185.392,00	0,00	298.853.625,00	1.237.039.017,00	0,00	1.477.130.792,00	0,00	298.853.625,00	1.775.984.417,00
35	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.013.558,00	0,00	552.058.630,00	1.097.072.188,00	0,00	545.013.558,00	0,00	552.058.630,00	1.097.072.188,00
38	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Badan Penghubung Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.709.213,00	0,00	0,00	519.709.213,00	0,00	519.709.213,00	0,00	0,00	519.709.213,00
42	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400.001,00	83.400.001,00	0,00	0,00	0,00	83.400.001,00	83.400.001,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.340.000,00	1.972.700.000,00	81.600.001,00	2.311.640.001,00	0,00	257.340.000,00	1.972.700.000,00	81.600.001,00	2.311.640.001,00
44	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.698.875.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.698.875.497,00

NO	NAMA OPD	SISA KEWAJIBAN TAHUN 2024				SUB TOTAL	PENAMBAHAN UTANG 2025				SUB TOTAL	SALDO KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 2025				SUB TOTAL
		PEGAWAI	BARANG JASA	HIBAH	MODAL		PEGAWAI	BARANG JASA	HIBAH	MODAL		PEGAWAI	BARANG JASA	HIBAH	MODAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (8)+(9)+(10)+(11)	(13) = (3) + (8)	(14) = (4) + (9)	(15) = (5) + (10)	(16) = (6) + (11)	(17) = (7)+(12)
45	Utang Jangka Pendek Lainnya (Utang Lebih Bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB))	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.100.196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	972.523.458,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674.623.655,37
46	Utang Jangka Pendek Lainnya (Utang Kurang salur atas BOS Dikmen 2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.350.000,00
	TOTAL	**0,00**	**17.374.004.131,91**	**0,00**	**71.615.013,70**	**20.912.069.342,11**	**2.301.534.175,00**	**91.597.536.189,67**	**5.218.176.234,73**	**27.912.214.261,99**	**188.700.859.817,26**	**2.301.534.175,00**	**108.971.540.321,58**	**5.218.176.234,73**	**27.983.829.275,69**	**209.612.929.159,37**

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	56.032.801,20
2	Penambahan Utang 2025	11.424.430.947,07
	Total Utang Belanja	**11.480.463.748,27**

A. UTANG BELANJA PEGAWAI PADA DINAS PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Kekurangan Pembayaran BPJS 4% Sertifikasi Guru PNSD atas TPG Tahun 2025	BPJS	-	754.195.180,00	2025
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Kekurangan Pembayaran BPJS 4% Sertifikasi Guru PPPK atas TPG Tahun 2025	BPJS	-	604.161.388,00	2025
							JUMLAH	**1.358.356.568,00**	

B. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA DINAS PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	NILAI UTANG
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Administari Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			450.000,00	2024
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Biaya Iuran BPJS Kesehatan Sebesar 4% Dan Gaji Pokok Atau Umk	-	-	6.260.600,00	2024
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	14.000.000,00	2024
4	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	LS Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 10 Batam (ASTACITA)	CV. Mekanika Teknik Consultant	02.0064.10/SPK/PWS/DISDIK/2025	51.259.800,00	2025
5	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Pengawasan Pekerjaan Lanjutan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 10 Batam	CV. TUAH PERMATA CONSULTANT	02.0064.22/SPK/PWS-SMK/DISDIK/2025	12.920.400,00	2025
6	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	LS Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 11 Batam (Konsolidasi)	CV. TUAH PERMATA CONSULTANT	02.0064.11/SPK/PWS-SMK/DISDIK/2025	47.130.600,00	2025
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Pengawasan Pembangunan RKB SMAN 1 Bintan Utara	CV. SKALA MULTI REKAYASA KONSULTAN	72.1/SPK-Add/PWS-APBD/SMA/DISDIK/2025	27.328.200,00	2025
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	LS Perencanaan Penataan Ruang SMAN 1 Karimun	CV. KARYA RUPADHATU	14.15/SPK/PER-APBD/SMA/DISDIK/2025	90.576.000,00	2025
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliaraan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	LS Belanja Pemeliharaan Kendaraan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	CV . INDAH JAYA PRKASA	EP-01KB477CBTH28CP6E6E6TF9YV1	75.177.000,00	2025
10	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	LS Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 29 Batam	CV. LOGIN KOMPUTINDO	EP01K89Z4028WTFCM9N6Y370FDQ4	28.504.799,00	2025
11	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Unit Sekolah Baru	5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	LS Pengawasan Lanjutan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLBN 2 Batam	CV. ZIQ-ZAQ CONSULTANT	03.01.03/SPK/PWS/DISDIK/2025	83.866.982,00	2025
12	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	LS Termyn 100% Rehabilitasi Berat Toilet SLBN Batam	CV. INSAN CIPTA PERKASA	03.69.02/SPK/DISDIK/2025	104.258.002,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	NILAI UTANG
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
13	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	LS Termyn 100% Rehabilitasi Berat Toilet SLBN Bintan Kijang	CV .KARYA SINAR ABADI	03.69.03/SPK/DISDIK/2025	104.228.777,00	2025
14	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	LS Termyn 100% Rehabilitasi Toilet SLBN 1 Tanjungpinang	CV SURYA BHAKTI UTAMA	03.69.05/SPK/DISDIK/2025	81.594.155,00	2025
15	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	LS Termyn 100% Rehabilitasi Ringan Toilet SLBN Batam	CV. INSAN CIPTA PERKASA	03.69.06/SPK/DISDIK/2025	173.658.502,00	2025
16	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	LS Pengawasan Pembangunan Toilet SLBN 2 Kijang dan Toilet SLBN Bintan Utara	CV. RANCANG DIMENSI KONSULTAN	03.08.04/SPK/PWS/DISDIK/2025	21.924.331,00	2025
17	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	LS Pengawasan Rehabilitasi Berat Toilet SLBN 1 Tanjungpinang,Toilet SLBN Natuna, ,Toilet SLBN Kijang , Toilet SLBN Batam	CV. RANCANG DIMENSI KONSULTAN	03.69.07/SPK/PWS//DISDIK/2025	39.927.377,00	2025
18	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	LS Perencanaan Rehabilitasi Ruang SLBN Kundur	PT. STUDIO EMPAT BELAS	03.69.08/SPK/PER/DISDIK/2025	13.968.240,00	2025
19	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	LS Termyn Rehabilitasi Ruang SLBN Kundur	CV. STANDARD SUKSES ABADI	03.69.09/SPK/DISDIK/2025	165.253.759,00	2025
20	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Pengawasan Rehabilitasi Ruang SLBN Kundur	CV. MEKANIKA TEKNIK CONSULTANT	03.69.10/SPK/PWS/DISDIK/2025	11.588.400,00	2025
21	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Mushalla SLBN Karimun	CV. Tuah Permata Consultant	03.08.07/SPK/PWS/DISDIK/2025	10.722.600,00	2025
22	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliaraan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	LS Belanja Pemeliharaan Kendaraan senilai Rp. 15.750.000 an CV. Indah Jaya Perkasa dg SP No.EP-01KB47B4TNPEZMGJW67RZD9DFA sub keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	CV . INDAH JAYA PRKASA	EP-01KB47B4TNPEZMGJW67RZD9DFA	15.750.000,00	2025
23	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Pengawasan Pembangunan Lapangan Olahraga SMAN 7 Tanjungpinang	CV. SKALA MULTI REKAYASA KONSULTAN	14.11/SPK/PWS/DISDIK/2025	14.674.200,00	2025
24	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Pengawasan Pembangunan RKB SMAN 25 Batam	CV. TEGUH PRATAMA CONSULTANT	72.3/SPK-ADD/PWS/DISDIK/2025	28.504.800,00	2025
25	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Pengawasan Pembangunan RKB SMAN 26 Batam	CV. TEGUH PRATAMA CONSULTANT	72.4/SPK-ADD/PWS/DISDIK/2025	28.504.800,00	2025
26	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Pengawasan Pembangunan RKB SMAN 5 Batam	CV. TEGUH PRATAMA CONSULTANT	72.2/SPK-ADD/PWS/DISDIK/2025	28.504.800,00	2025
27	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Unit Sekolah Baru	5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Pengawasan Pembangunan USB SMA di Rempang Galang Batam	CV. TANJAK KONSULTAN AUGERAH	01.9/SPK-ADD/PWS/DISDIK/2025	35.869.650,00	2025
28	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 20 Batam	PT. TANJAK KONSULTAN ANUGERAH	72.6/SPK/PWS/DISDIK/2025	19.807.950,00	2025
29	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 20 Batam	CV. TEGUH PRATAMA CONSULTANT	72.6/SPK/PER/DISDIK/2025	22.870.440,00	2025
30	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	5.1.02.02.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	LS Makan Minum Rp. 26.904.000 an CV. Karunia Pratama dg Kontrak 0058/SPK/PENG/DISDIK/VIII/2025 sub keg Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	CV. KARUNIA PRATAMA	0058/SPK/PENG/DISDIK/VIII/2025	26.904.000,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	NILAI UTANG
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
31	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Konsultan IT Database	LS Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp. 68.931.000 an CV. Riqcom Services dg Kontrak.10052.1/SPK/PL/DISDIK/2025 sub keg Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	CV. RIQCOM SERVICES	10052.1/SPK/PL/DISDIK/2025	68.931.000,00	2025
32	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	LS Belanja Jasa Rp. 44.700.000 an CV. Peforma teknologi Nusantara dg Kontrak.EP-01KB1NPVMJKTYR64HP7V7D8KY1 Instalasi Listrik SMKN 11 Batam	CV. Peforma teknologi Nusantara	EP-01KB1NPVMJKTYR64HP7V7D8KY1	44.700.000,00	2025
33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	LS Belanja Jasa Rp. 99.300.000 an CV. Peforma teknologi Nusantara dg Kontrak.EP-01KCONZ9GH689FD6TAK0XDNNOO Instalasi Listrik SMKN 1 Kundur	CV. Peforma teknologi Nusantara	EP-01KCONZ9GH689FD6TAK0XDNNOO	99.300.000,00	2025
34	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	LS Belanja Jasa Rp. 23.900.000 an CV. Dua Putra Gemilang Optima dg Kontrak No. EP-01KB1NHV6Z38G8FX0SFRJTJFKQ Instalasi Listrik SMKN 9 Batam	Dua Putra Gemilang Optima	EP-01KB1NHV6Z38G8FX0SFRJTJFKQ	23.900.000,00	2025
35	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	LS Belanja Jasa Rp. 24.986.655 an CV.Cipta Karya Anda dg Kontrak No. 08.0002.c2/SPK/DISDIK/2025 Instalasi Air SMKN 11 Batam	CV.Cipta Karya Anda	08.0002.c2/SPK/DISDIK/2025	24.986.655,00	2025
36	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	LS Belanja Internet senilai Rp. 175.000.000 a.n PT. Medianusa Permana dg Kontrak No. 08.0002.II/SPK/PL/DISDIK/2025 sub keg Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	PT. Medianusa Permana	08.0002.II/SPK/PL/DISDIK/2025	175.000.000,00	2025
37	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Provinsi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	LS Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp. 24.048.150 an CV. Maestro Duta Asia dg Kontrak. 04.1.01.0002/SPK/PPK-DISDIK/2025 Perencanaan Pembuatan Aplikasi SIMPTK Terintegrasi dengan API Dapodik	CV. Maestro Duta Asia	04.1.01.0002/SPK/PPK-DISDIK/2025	24.048.150,00	2025
38	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	LS Pemeliharaan Komputer senilai Rp. 22.250448 an CV. Login Komputindo dg Kontrak No. EP01K89Z4028WTFCM9N6Y370FDQ4 sub keg Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	CV. LOGIN KOMPUTINDO	EP01K89Z4028WTFCM9N6Y370FDQ4	22.250.448,00	2025
39	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	LS Pengawasan Rp. 11.932.563,27 an CV. Sultan Consultant dg Kontrak. 02.0010.21/SPK/PWS-SMK/DISDIK/2025 Pembangunan Drainase, Toilet SMKN 10 Batam dan Toilet SMKN 11 Batam (ASTACITA)	CV. SULTAN CONSULTANT	02.0010.21/SPK/PWS-SMK/DISDIK/2025	11.932.563,27	2025
40	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Koreksi kurang catat sisa kas Bantuan Personil berupa bantuan Praktek Kerja Lapangan untuk peserta didik SMKN			90.891.100,00	2025
							JUMLAH	**1.971.929.080,27**	

C. UTANG BELANJA MODAL PADA DINAS PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.2.3.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	LS Termyn 95% senilai Rp. 163.333.500 a.n CV. Jasa Karya Jaya dg Kontrak No. 080/SPK/DISDIK/2021 dg nilai Rp. 171.930.000 keg Pematangan Lahan SMKN 9 Batam Sub Keg Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	CV. JASA KARYA JAYA	080/SPK/DISDIK/2021	26.725.701,20	2024
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.2.3.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	LS Retensi 5% senilai Rp. 8.596.500 a.n CV. Jasa Karya Jaya dg Kontrak No. 080/SPK/DISDIK/2021 dg nilai Rp. 171.930.000 keg Pematangan Lahan SMKN 9 Batam Sub Keg Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	CV. JASA KARYA JAYA	080/SPK/DISDIK/2021	8.596.500,00	2024

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	NILAI UTANG
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	LS Termyn 100% sub keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	CV Bena Insan Gemilang	09.10.II/SPK/DISDIK/2025	199.314.408,00	2025
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	LS Termyn 100% Pemasangan Keramik Cabdin Lingga Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	CV Generasi Lintas Dimensi	09.0010.5b/SPK/DISDIK/2025	43.473.660,00	2025
5	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	LS Termyn 65% Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 10 Batam (ASTACITA)	CV. Putra Saprindo	EP 01K4Y6G1FKJ5RBEJRNSMCDAP3	714.292.306,00	2025
6	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Mebel Sekolah	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	LS Belanja Modal Mebel Pengadaan Meubeler Ruang Kepala sekolah dan Tata Usaha SMKN 1 Lingga	CV. Multi Karya	EP 01K56173BQV7V1VMYGPJQ7NSTA	90.001.020,00	2025
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	LS Termyn 100% Pembangunan Ruang Kepala Sekolah dan Tata Usaha SMK Negeri 2 Lingga	CV. Setia Jaya	02.0003.3/SPK/FISIK SMK/DISDIK/2025	216.647.028,65	2025
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	LS Termyn 100% Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 10 Batam (ASTACITA)	CV. Putra Saprindo	EP01K4Y6G1FKJ5RBEJRNSMCDAP3	424.262.239,14	2025
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	LS Termyn 100% Pembangunan Musholla SMKN 10 Batam	CV. Nyoka Mandiri	02.0010.44/SPK/FISIK SMK/DISDIK/2025	190.374.881,70	2025
10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	LS Termyn 100% Lanjutan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 10 Batam	CV. BINTANG KARYA ALAMI	02.0064.21/SPK/FISIK-SMK/DISDIK/2025	378.541.033,38	2025
11	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	5.2.02.08.03.0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	LS Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan Pengadaan Alat Praktik Siswa KK Teknik Elektronika Industri SMKN 11 Batam	CV. MUDAMAS MANDIRI	EP-01KC8QEMW9R92XGNN30AVPXQYY	500.721.000,00	2025
12	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	5.2.02.08.03.0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	LS Pengadaan Alat Praktik Siswa KK Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN 11 Batam	CV. MUDAMAS MANDIRI	EP-01KC8P8GK7SV9M5TCSYW9FZ24	501.720.000,00	2025
13	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	LS Termyn 100% Pembangunan Lapangan Olahraga SMAN 7 Tanjungpinang	PT. TAQIYA SUMBER BAHAGIA	14.11/SPK/FISIK/DISDIK/2025	163.325.556,00	2025
14	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	LS Belanja Modal Alat Musik Pengadaan Marching Band SMA Negeri di Batam	CV. MANDALA SIRI	38.01/SP/SMA-DISDIK/2025	102.860.000,00	2025
15	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	LS Belanja Vertical Blind	CV. B'Media	EP-01KAZMMJXGF0M08R19XW5AHK43	12.987.000,00	2025
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	Belanja Modal Peralatan Jaringan	CV. Peforma teknologi Nusantara	EP-01K8SCBC4N44J2X8JHYEFFTRFQS	21.040.000,00	2025
17	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat - Meja Rapat Pejabat	CV. B'Media	EP-01KAZJSQ2EKVXN8F4ZPNYGEKW	29.415.000,00	2025
18	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	LS Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	CV. Peforma teknologi Nusantara	EP-01K93BHZ9SHRXS2NZTZHFEEQY0	110.185.000,00	2025
19	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	LS Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	CV. Peforma teknologi Nusantara	EP-01K93BHZ9SHRXS2NZTZHFEEQY0	101.330.000,00	2025
20	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	LS Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	CV. Peforma teknologi Nusantara	EP-01K93BHZ9SHRXS2NZTZHFEEQY0	44.700.000,00	2025
21	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	LS Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	CV. Peforma teknologi Nusantara	EP-01K93BHZ9SHRXS2NZTZHFEEQY0	70.000.000,00	2025
22	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	LS Termyn 100% Pembangunan RKB SMAN 20 Batam	CV. INSAN CIPTA PERKASA	72.6/SPK/FISIK/DISDIK/2025	349.746.000,00	2025
23	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	LS Termyn 100%Semenisasi Lapangan SMAN 1 Karimun	CV. DWI KARYA MANDIRI	14.12/SPK/FISIK/DISDIK/2025	160.008.699,00	2025
24	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	LS Termyn 100% Pemasangan Keramik SMAN 1 Karimun	CV. DWI KARYA MANDIRI	14.13/SPK/FISIK/DISDIK/2025	206.557.785,00	2025
25	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rehabilitasi Muhsolla SMAN 1 Ungar, Kab. Karimun	CV. DWI KARYA MANDIRI	68.02/SPK/FISIK/DISDIK/2025	170.014.619,00	2025
26	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	LS Termyn 65% Pembangunan Ruang Kela Baru (RKB) SMKN 11 Batam (Konsolidasi)	CV. Sonica Jaya	Nomor Pesanan EP-01K4KH0N2C5QC20NB5S2CE8RMV	1.170.658.779,00	2025
27	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	LS Termyn 100% Pembangunan Ruang Kela Baru (RKB) SMKN 11 Batam (Konsolidasi)	CV. Sonica Jaya	Nomor Pesanan EP-01K4KH0N2C5QC20NB5S2CE8RMV	738.808.588,01	2025
28	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Mebel Sekolah	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Pengadan Meubiler SMAN 1 Bintan Utara	CV MULTI KARYA	36.03/SP/SMA-DISDIK/2025	98.000.000,00	2025
29	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Mebel Sekolah	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Pengadan Meubiler SMAN 7 TANJUNGPINANG	CV. TAQIYA SUMBER BAHAGIA	36.08/SP/SMA-DISDIK/2025	95.615.400,00	2025
30	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Mebel Sekolah	5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	LS Pengadaan Meubeler SMAN 1 Seluan	CV. TENANG AJA	36.09/SP/SMA-DISDIK/2025	2.546.000,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	NILAI UTANG
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
31	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Mebel Sekolah	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	LS Pengadaan Meubeler SMAN 1 Seluan	CV. TENANG AJA	36.09/SP/SMA-DISDIK/2025	60.765.840,00	2025
32	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Mebel Sekolah	5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	LS Pengadaan Meubeler SMAN 1 Seluan	CV. TENANG AJA	36.09/SP/SMA-DISDIK/2025	1.445.560,00	2025
31	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar Pembangunan Batu Miring SMKN 1 Karimun	LS Termyn 100% Pembangunan Batu Miring SMKN 1 Karimun	CV. BALQIS JAYA	02.0010.42/SPK/FISIK-SMK/DISDIK/2025	186.923.693,00	2025
32	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Mebel Sekolah	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	LS Belanja Modal Pengadaan Mebel pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 11 Batam	CV. MUTU UTAMA	EP- 01KWQ2YBF6YM5CRFP3JD0KFSA	159.160.000,00	2025
33	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	LS Termyn 100% Lanjutan Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling (BK) SMKN 9 Batam	CV. Putra Saprindo	02.0010.51/SPK/FISIK-SMK/DISDIK/2025	70.359.826,07	2025
34	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	LS Termyn 100% Pembangunan Drainase SMKN 10 Batam	CV. Lantabur Kindur Mandiri	02.0010.45/SPK/FISIK-SMK/DISDIK/2025	33.219.369,99	2025
35	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Mebel Sekolah	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	LS Belanja Modal Pengadaan Meubel SLBN 2 Batam	CV.MUTU UTAMA	EP-01K8STF99WTVZ9N4AAM97A5R56	199.150.000,00	2025
36	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	LS Termyn 100% Lanjutan Pembangunan Mushalla SLBN Karimun	CV. PRATAMA GEMILANG	03.08.06/SPK/DISDIK/2025	158.099.545,00	2025
37	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	LS Belanja Modal Personal Computer Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BTIKP)	CV. UNISINDO	1.01.01.1.06.0002.2/SP/PPK-BTIKP/DISDIK/2025	42.992.520,00	2025
38	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	LS Termyn 100% Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 29 Batam	CV PUTRA SAPRINDO	72.5/SP//FISIK/DISDIK/2025	295.593.541,86	2025
							JUMLAH	**8.150.178.100,00**	

LAMPIRAN 9-B

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	-
2	Penambahan Utang 2025	1.651.099.747,00
	Total Utang Belanja	**1.651.099.747,00**

A. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	4	5	*6*	*7*	8	9	10
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	Pembayaran Belanja Bantuan Pengobatan Pasien Jaminan Kesehatan ke RSJKO Engku Haji Daud Tanjung Uban	RSJKO	-	66.622.200,00	2025
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Darat Bermotor-Kendaraan bermotor penumpang untuk Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya.	EFENDI	917/SP-UPTDIF.DINKES/XI/2025	30.489.200,00	2025
3	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Bulan November sd Desember 2025) Rumah Singgah Mahligai Keris Batam Tahun Anggaran 2025	PT. BIO STEM INDONESIA	038/SP-YANKES/DINKES/III/2025	22.185.000,00	2025
4	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	Belanja Bantuan Pengobatan Pasien Jmainan Kesehatan ke Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib Kota Tanjungpinang	RSUD RAJA AHMAD TABIB	-	307.503.000,00	2025
5	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	Pengajuan Ls Belanja Jasa Pemeriksaan Massal TBC Di Wilayah Kerja Kabupaten Bintan Program Prioritas Gubernur Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	MARIAMAN TJENDERA	EP-01K851NOBEK02S3YFX6WC4H85W-AD01	102.731.832,00	2025
6	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	Pengajuan Ls Belanja Jasa Pemeriksaan Massal Tbc Di Wilayah Kerja Kabupaten Karimun Program Prioritas Gubernur Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	MARIAMAN TJENDERA	EP-01K8520YY145KSKZ4DEWMV6PDY-AD01	239.060.367,00	2025
7	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	Pengajuan Ls Belanja Jasa Pemeriksaan Massal Tbc Di Wilayah Kerja Kota Batam Program Prioritas Gubernur Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	MARIAMAN TJENDERA	EP.01K8516F969RAN4YTY64XBBHAY-AD02	455.188.800,00	2025
8	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	Pengajuan Ls Belanja Jasa Pemeriksaan Massal Tbc Di Wilayah Kerja Kota Tanjungpinang Program Prioritas Gubernur Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	MARIAMAN TJENDERA	EP-01K852GFXJ6X653J72QH19HW9C-AD02	330.321.348,00	2025
9	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	Belanja Pembayaran Bantuan Pengobatan Pasien Jaminan Kesehatan ke RS Graha Hermine Kota Batam	RS GRAHA HERMINE	-	19.084.500,00	2025
10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	Belanja Bantuan Pengobatan Pasien Jaminan Kesehatan ke Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam	RSBP RPL 137 BLU BP BATAM	-	27.037.500,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
11	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi P	Kontribusi luran PBI JK Tahun 2025	JAMKESDA		926.000,00	2025
							JUMLAH	**1.601.149.747,00**	

B. UTANG BELANJA MODAL PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Belanja Modal Personal Komputer Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinkes Prov Kepri Th 2025	ANDIKA PUTRA GANSAL	EP-01K93PW2C51926V4MEBVCCS543	49.950.000,00	2025
							JUMLAH	**49.950.000,00**	**-**

LAMPIRAN 9-C

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	-
2	Penambahan Utang 2025	3.831.704.349,00
	Total Utang Belanja	**3.831.704.349,00**

A. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-obatan	Belanja Obat-Obatan - Obat Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan Dan Minuman Di Fasilitas Kesehatan RSUD Raja Ahmad Tabib Kepada Pt. Enseval Putera Megatrading	PT. Kimia Farma Trading & Distribution	EP-01K860MTS2FYPH546SGR271PAP	782.055.384,00	2025
2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-obatan	Belanja Obat-Obatan - Obat Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan Dan Minuman Di Fasilitas Kesehatan RSUD Raja Ahmad Tabib Kepada PT. Enseval Putera Megatrading	PT. Enseval Putera Megat	EP-01K917EKX43D8Y8J3A12R6XE9K	359.282.025,00	2025
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Belanja Pemeliharan Atap Kanopi) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Pada RSUD Raja Ahmad Tabib	CV. Karya Gemilang	EP-01KA7T527VTTCTZDTK3GDWFGBY	191.645.940,00	2025
4	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Belanja Liquid Helium Lhe 500l For Mri-Refilling) Sub Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Pada RSUD Raja Ahmad Tabib	PT. Sinergi Batam Jaya	EP-01K96T8HP4VSTNHBCDYJYHNE2Z-AD01	2.247.750.000,00	2025
							JUMLAH	**3.580.733.349,00**	

B. UTANG BELANJA MODAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Belanja Modal Pembuatan Kanopi) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Pada RSUD Raja Ahmad Tabib	CV. Karya Gemilang	EP-01KA7R7DHKK3AAXVF0NZSRDZCB	195.360.000,00	2025
2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Belanja Modal Personal Computer (Laptop I7) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan RSUD Raja Ahmad Tabib	CV. Global Mandiri Sukses	EP-01K8SQ8FBYH7ZFBA3ZKJB46BK7	55.611.000,00	2025
							JUMLAH	**250.971.000,00**	**-**

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	15.993.531.798,00
2	Penambahan Utang 2025	14.292.942.690,00
	Total Utang Belanja	**30.286.474.488,00**

A. UTANG BELANJA PEGAWAI DAN JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB (BLUD) TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Tahun			943.177.607,00	2025
							JUMLAH	**943.177.607,00**	

B. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB (BLUD) TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Pembayaran Hutang jasa Pelayanan Susulan BPJS Kesehatan Bulan Agustus 2023 RSUD RAT	RSUD RAJA AHMAD TABIB	78/ND-RSUD/1.2	740.200,00	2024
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Pembayaran Hutang jasa Pelayanan Susulan BPJS Kesehatan Bulan Desember 2023 RSUD RAT	RSUD RAJA AHMAD TABIB	79.1/ND-RSUD/1.2	163.485.409,00	2024
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0014	Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan	Pembayaran Hutang jasa Pelayanan Susulan BPJS Kesehatan Bulan Februari 2024 RSUD RAT	RSUD RAJA AHMAD TABIB	80/ND-RSUD/1.2	185.443.520,00	2024
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0014	Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan	Pembayaran Hutang jasa Pelayanan Susulan BPJS Kesehatan Bulan Januari 2024 RSUD RAT	RSUD RAJA AHMAD TABIB	79.2/ND-RSUD/1.2	143.228.840,00	2024
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0014	Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan	Pembayaran Hutang jasa Pelayanan Susulan BPJS Kesehatan Bulan November 2023 RSUD RAT	RSUD RAJA AHMAD TABIB	79/ND-RSUD/1.2	150.576.960,00	2024
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0014	Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan	Pembayaran Hutang jasa Pelayanan Susulan BPJS Kesehatan Bulan Oktober 2023 RSUD RAT	RSUD RAJA AHMAD TABIB	78.2/ND-RSUD/1.2	80.686.760,00	2024
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0014	Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan	Pembayaran Hutang jasa Pelayanan Susulan BPJS Kesehatan Bulan September 2023 RSUD RAT	RSUD RAJA AHMAD TABIB		251.600,00	2024
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0014	Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan	Pembayaran Hutang jasa Pelayanan Susulan PC/UMUM Bulan Desember 2024 RSUD RAT	RSUD RAJA AHMAD TABIB	76.2/ND-RSUD/1.2	299.896.545,00	2024
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0014	Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan	Pembayaran Hutang jasa Pelayanan Susulan PC/UMUM Bulan November 2024 RSUDRAT	RSUD RAJA AHMAD TABIB	76.1/ND-RSUD/1.2	238.076.145,00	2024
10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0014	Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan	Pembayaran Hutang jasa Pelayanan Susulan PC/UMUM Bulan Oktober 2024 RSUD RAT	RSUD RAJA AHMAD TABIB	76/ND-RSUD/1.2	213.143.129,00	2024
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0014	Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan	Pembayaran Jasa Pelayanan BPJS Kesehatan Bulan Juli 2024 RSUD RAT	RSUD RAJA AHMAD TABIB	77/ND-RSUD/1.2	3.231.456.432,00	2024
12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0014	Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan	Pembayaran Jasa Pelayanan BPJS Kesehatan Bulan Agustus 2024 RSUD RAT	RSUD RAJA AHMAD TABIB	77.1/ND-RSUD/1.2	3.305.632.360,00	2024
13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0014	Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan	Pembayaran Jasa Pelayanan BPJS Kesehatan Bulan September 2024 RSUDRAT	RSUD RAJA AHMAD TABIB	77.2/ND-RSUD/1.2	3.124.681.607,00	2024
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0014	Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan	Pembayaran Hutang Jasa Pelayanan Susulan BPJS Kesehatan Bulan Maret 2024 RSUD RAT	RSUD RAJA AHMAD TABIB	80.1/ND-RSUD/1.2	159.468.320,00	2024
15	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0014	Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan	Pembayaran Hutang Jasa Pelayanan Susulan BPJS Kesehatan Bulan April 2024 RSUD RAT	RSUD RAJA AHMAD TABIB	80.2/ND-RSUD/1.2	135.819.040,00	2024
16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0014	Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan	Pembayaran Hutang Jasa Pelayanan Susulan BPJS Kesehatan Bulan Mei 2024 RSUD RAT	RSUD RAJA AHMAD TABIB	81/ND-RSUD/1.2	185.802.120,00	2024
17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0014	Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan	Pembayaran Hutang Jasa Pelayanan Susulan BPJS Kesehatan Bulan Juni 2024 RSUD RAT	RSUD RAJA AHMAD TABIB	81.1/ND-RSUD/1.2	113.033.030,00	2024

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10
18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0014	Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan	Pembayaran Hutang Jasa Pelayanan Susulan BPJS Kesehatan Bulan Juli 2024 RSUD RAT	RSUD RAJA AHMAD TABIB	81.2/ND-RSUD/1.2	129.631.240,00	2024
19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0014	Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan	Pembayaran Hutang Jasa Pelayanan Susulan BPJS Kesehatan Bulan Agustus 2024 RSUD RAT	RSUD RAJA AHMAD TABIB		160.183.680,00	2024
20	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0014	Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan	Pembayaran Hutang Jasa Pelayanan BPJS Kesehatan IHK Bulan Januari - Desember 2024 RSUD RAT	RSUD RAJA AHMAD TABIB	82.1/ND-RSUD/1.2	16.720.000,00	2024
21	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0014	Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan	Pembayaran Hutang Jasa Pelayanan Jaminan Parsial Bulan Juli - Desember 2024 RSUD RAT	RSUD RAJA AHMAD TABIB	83/ND-RSUD/1.2	116.490.744,00	2024
22	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0014	Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan	Pembayaran Hutang Jasa Pelayanan BPJS Kesehatan Kenaikan Kelas Bulan Juli - Desember 2024 RSUD RAT	RSUD RAJA AHMAD TABIB	82.2/ND-RSUD/1.2	193.491.559,00	2024
23	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0014	Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan	Pembayaran Hutang Jasa Komite Koordinasi Periode Oktober - Desember 2024 RSUD RAT	RSUD RAJA AHMAD TABIB	84/ND-RSUD/1.2	12.600.000,00	2024
24	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0014	Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan	Pembayaran Jasa Dokter Pendidikan Klinis Periode Bulan September - November 2024 RSUD RAT	RSUD RAJA AHMAD TABIB		85.750.000,00	2024
25	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0014	Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan	Pembayaran Hutang Jasa Pelayanan Perceptor Klinik/ CI Tahun 2024 RSUD RAT	RSUD RAJA AHMAD TABIB	84.2/ND-RSUD/1.2	65.253.900,00	2024
26	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0014	Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan	Belanja Remunerasi (Jasa Pelayanan) 1 Kegiatan Hutang Jasa Pelayanan TCM & Pengepakan TBMDR Januari - Dsember 2024	RSUD RAJA AHMAD TABIB	82.2/ND-RSUD/1.2	61.436.608,00	2024
27	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0014	Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan	Pembayaran Hutang Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Lainnya Bulan Juli - Desember 2024 RSUD RAT	RSUD RAJA AHMAD TABIB	83.1/ND-RSUD/1.2	3.415.664.300,00	2024
28	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0014	Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan	Belanja Remunerasi (Jasa Pelayanan) 1 Kegiatan Hutang Jasa Pelayanan Pengambailan Data Penelitian 2023	RSUD RAJA AHMAD TABIB	85.1/ND-RSUD/1.2	1.627.500,00	2024
29	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0014	Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan	Belanja Remunerasi (Jasa Pelayanan) 1 Kegiatan Komite Etik Penelitian Kesehatan dan Unit Kerja Tahun 2024	RSUD RAJA AHMAD TABIB	85/ND-RSUD/1.2	3.260.250,00	2024
30	Pelayanan Medik dan penunjang Medik	Pelayanan Medik Umum	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Pemeriksaan Sampel Jaringan Medis Bulan Desember Pada RSK Dharmais	RSK DARMAIS JAKARTA	-	2.800.000,00	2025
31	Administrasi umum perangkat daerah dan/atau BLUD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan/ atau BLUD	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	koordinasi dan konsultasi ke rumah sakit kanker darmais dan awal bros batam	-	-	13.195.034,00	2025
32	Pelayanan Non Medik	Penyiapan perumusan dan pelaksaan pelayanan kesehatan rujukan	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	merujuk pasien ke awal bros batam	-	-	1.704.000,00	2025
33	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. PENTA VALENT TBK	1030/SP/RSUDRAT/BLUD-BHP/IX/2025	3.663.000,00	2025
34	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. PENTA VALENT TBK	EP-01K82FY7VKMKECCJBNG6CVF0CH	15.064.920,00	2025
35	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. PENTA VALENT TBK	EP-01K7KYKKKQV4WFW3X30FN5WB7V	6.759.900,00	2025
36	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. PENTA VALENT TBK	EP-01K885C1CSPTEPTF4THV6NRQCE	4.364.964,00	2025
37	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. PENTA VALENT TBK	EP-01K7KYGG9MEMCRJHHWVHJ9AQMT	12.476.002,00	2025
38	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. PENTA VALENT TBK	1064/SP/RSUDRAT/BLUD-BHP/X/2025	48.164.288,00	2025
39	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. ESPANA INTI PERKASA	1031/SP/RSUDRAT/BLUD-BHP/X/2025	214.855.915,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10
40	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. ESPANA INTI PERKASA	1033/SP/RSUDRAT/BLUD-BHP/XI/2025	24.420.000,00	2025
41	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. ESPANA INTI PERKASA	1034/SP/RSUDRAT/BLUD-BHP/XI/2025	304.371.540,00	2025
42	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. ESPANA INTI PERKASA	1097/SP/RSUDRAT/BLUD-BHP/XII/2025	57.827.304,00	2025
43	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. MEDICOM HEALTHCARE INDONESIA	1051/SP/RSUDRAT/BLUD-BHP/IX/2025	49.050.000,00	2025
44	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. MEDICOM HEALTHCARE INDONESIA	1053/SP/RSUDRAT/BLUD-BHP/XI/2025	39.240.001,00	2025
45	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. SURGIKA ALKESINDO	1054/SP/RSUDRAT/BLUD-BHP/XI/2025	22.500.000,00	2025
46	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA	1055/SP/RSUDRAT/BLUD-BHP/IX/2025	2.650.000,00	2025
47	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA	1057/SP/RSUDRAT/BLUD-BHP/X/2025	13.702.950,00	2025
48	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA	1058/SP/RSUDRAT/BLUD-BHP/XI/2025	23.310.000,00	2025
49	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA	1069/SP/RSUDRAT/BLUD-BHP/IX/2025	20.657.000,00	2025
50	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. KASTARA TEKNOLOGI INTERNASIONAL	EP-01KAX4BKE2YEM087FS0HM94HT9	6.923.403,00	2025
51	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. KASTARA TEKNOLOGI INTERNASIONAL	EP-01K82TZY4P850DSFF67SA7C8PT	103.995.767,00	2025
52	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. TAMARA OVERSEAS CORPORINDO	EP-01K7E76F2P2R4872F2SQB24W1E	14.430.000,00	2025
53	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. ENDO INDONESIA	EP-01K830CWNNQ2KEBD4ZB0NVSYJ3	11.655.000,00	2025
54	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. WIDO ABADI SUKSES	EP-01K7ETEETM3WDT6FGA4YE7D850	9.800.000,00	2025
55	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. WIDO ABADI SUKSES	EP-01K771R88B361HJ7HT7Q1DJVRA	5.650.000,00	2025
56	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. WIDO ABADI SUKSES	EP-01KC6AEG4STWETEYQ0V45GWG86	9.800.000,00	2025
57	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL	196/SPK/RSUDRAT/BLUD-BHP/X/2025	75.998.592,00	2025
58	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL	'EP-01K740TKJWXZQ1VKQDEFJ4KKRS	152.213.473,00	2025
59	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL	EP-01K75H1YR5C9Q8VRZJ896N26XT	12.311.676,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10
60	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL	EP-01K7GRKTABCXH5J7HRBKBZ2KTQ	96.847.056,00	2025
61	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL	EP-01KASPZ7JJ5V9TBKDHW14T1S7J	57.694.248,00	2025
62	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL	'EP-01KAX4YV3ZPVXD3Y8TAWDRMCHZ	15.725.992,00	2025
63	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL	1067/SP/RSUDRAT/BLUD-BHP/VIII/2025	1.859.472,00	2025
64	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL	1065/SP/RSUDRAT/BLUD-BHP/IX/2025	4.251.744,00	2025
65	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL	EP-01KC0PK8AF911VTB9600A7AQPH	87.469.332,00	2025
66	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL	EP-01KCNN493QVKKXTT523E4R6GJG	53.546.400,00	2025
67	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. OASIS MITRA ALKES	1062/SP/RSUDRAT/BLUD-BHP/IX/2025	4.839.489,00	2025
68	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. OASIS MITRA ALKES	EP-01K7GQJBD4B52S6BQPE7J80M88	139.178.568,00	2025
69	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. OASIS MITRA ALKES	EP-01K7S9N2AV52XX8BG2WXART2H5	7.832.160,00	2025
70	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. OASIS MITRA ALKES	EP-01K7S98981SEJ4C9P7WN46VTPM	191.991.206,00	2025
71	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. OASIS MITRA ALKES	EP-01K8T1B38X590A1Q53482885C3	16.463.520,00	2025
72	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. OASIS MITRA ALKES	EP-01K9P843HWQTYAYJW8N354GP74	50.077.650,00	2025
73	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. OASIS MITRA ALKES	EP-01KA0K11WSH6KCMPKWDKSCQP6C	999.000,00	2025
74	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. OASIS MITRA ALKES	EP-01KADMS311A8VKJ0R85HYR37FP	18.286.584,00	2025
75	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. OASIS MITRA ALKES	EP-01KC0JZFCVGKDS1SKA4GQPRXQ0	52.106.730,00	2025
76	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. OASIS MITRA ALKES	EP-01KCFRBJ79V1M0QN63CQTCYVED	7.597.950,00	2025
77	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. OASIS MITRA ALKES	EP-01KCKP300RHG19C2NFA073SJ8T	2.497.500,00	2025
78	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. OASIS MITRA ALKES	EP-01KD73GMAG2GKF82VYS2ARWCFX	7.343.982,00	2025
79	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. ALTA MEDIKA MANDIRI	174/SPK/RSUD-RAT/BLUD-BHP/VIII/2025	130.000.000,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10
80	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. ALTA MEDIKA MANDIRI	1097/SP/RSUD-RAT/BLUD-BHP/VIII/2025	130.000.000,00	2025
81	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. ALTA MEDIKA MANDIRI	181/SPK/RSUD-RAT/BLUD-BHP/IX/2025	494.000.000,00	2025
82	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. ALTA MEDIKA MANDIRI	212/SPK/RSUD-RAT/BLUD-BHP/XII/2025	182.000.000,00	2025
83	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. ARIANDA MITRA SEJAHTERA	648/SP/RSUD-RAT/BLUD-BHP/V/2025	6.500.000,00	2025
84	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. REVASS UTAMA MEDIKA	1081/SP/RSUD-RAT/BLUD-BHP/IX/2025	240.701.000,00	2025
85	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. REVASS UTAMA MEDIKA	809/SP/RSUD-RAT/BLUD-BHP/IV/2025	49.599.995,00	2025
86	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. PELANGI RAPHA SEMESTA	911/SP/RSUD-RAT/BLUD-BHP/VII/2025	201.975.300,00	2025
87	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. PELANGI RAPHA SEMESTA	EP-01K9C6VBR0VDTRVCDKVHVYDHEZ	37.740.000,00	2025
88	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. PELANGI RAPHA SEMESTA	EP-01KA0KJ36BRHZJTJ1EHHXYZRDT	666.000,00	2025
89	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. PELANGI RAPHA SEMESTA	913/SP/RSUD-RAT/BLUD-BHP/VII/2025	138.311.000,00	2025
90	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. PELANGI RAPHA SEMESTA	923/SP/RSUD-RAT/BLUD-BHP/IX/2025	175.264.628,00	2025
91	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. PELANGI RAPHA SEMESTA	1036/SP/RSUD-RAT/BLUD-BHP/IX/2025	102.022.200,00	2025
92	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. PELANGI RAPHA SEMESTA	EP-01K7KJRCF7W8ABFFPN8948KMHT	277.095.960,00	2025
93	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. PELANGI RAPHA SEMESTA	1080/SP/RSUD-RAT/BLUD-BHP/XI/2025	12.776.100,00	2025
94	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. PELANGI RAPHA SEMESTA	EP-01KC6AZCJVRABEC8JW5FRWTR31	125.021.742,00	2025
95	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. PELANGI RAPHA SEMESTA	EP-01KC6B1ET86J25EPAQWJK17BQG	2.432.998,00	2025
96	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. PELANGI RAPHA SEMESTA	1056/SP/RSUD-RAT/BLUD-BHP/IX/2025	24.931.155,00	2025
97	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. PELANGI RAPHA SEMESTA	1012/SP/RSUD-RAT/BLUD-BHP/X/2025	22.227.750,00	2025
98	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. SENTRAL BERDIKARI MEDIKA	1015/SP/RSUD-RAT/BLUD-BHP/X/2025	45.066.000,00	2025
99	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. SENTRAL BERDIKARI MEDIKA	1016/SP/RSUD-RAT/BLUD-BHP/X/2025	22.430.880,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10
100	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. SINERGI TRIDAYA MEDICAL	EP-01K8HSPXK55WQD0HPEJK15SW05	5.382.599,00	2025
101	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. TAWADA HEALTHCARE	EP-01K82S66SX7S2GMJSYCEH7C14Q	8.044.392,00	2025
102	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. ANUGERAH MEDILAB PERKASA	EP-01K7DKPG7XD5T6PCGABR2YWYNE	22.959.977,00	2025
103	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. PERMATA ANUGERAH VIBRASA	948/SP/RSUD-RAT/BLUD-BHP/VII/2025	4.884.000,00	2025
104	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. INTERGASTRA NUSANTARA	1035/SP/RSUD-RAT/BLUD-BHP/X/2025	31.838.130,00	2025
105	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. ANUGERAH MEDILAB PERKASA	EP-01K99KK8JQ5GB523Q8FZC13W5F	8.200.000,00	2025
106	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. TRIPUTRA AMAN MAKMUR	EP-01K7719NX9HQCKQ00SBPF0R1WX	155.400.000,00	2025
107	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. TAWADA HEALTHCARE	437/SP/RSUD-RAT/BLUD-BHP/IV/2025	65.000.000,00	2025
108	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. BINA ARTHA SEMESTA	214/SPK/RSUD-RAT/BLUD-BHP/VIII/2025	50.144.250,00	2025
109	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. SURIS WAHANACIPTA	497/SP/RSUD-RAT/BLUD-BHP/V/2025	45.300.000,00	2025
110	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT . DIPA PHARMALAB INTERSAINS	1084/SP/RSUD-RAT/BLUD-BHP/VIII/2025	93.199.998,00	2025
111	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT . DIPA PHARMALAB INTERSAINS	1085/SP/RSUD-RAT/BLUD-BHP/IX/2025	3.750.000,00	2025
112	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT . DIPA PHARMALAB INTERSAINS	485/SP/RSUD-RAT/BLUD-BHP/V/2025	84.090.825,00	2025
113	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. WEGO MEDIKA INDONESIA	1092/SP/RSUD-RAT/BLUD-BHP/IX/2025	77.700.000,00	2025
114	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. WEGO MEDIKA INDONESIA	361/SP/RSUD-RAT/BLUD-BHP/III/2025	10.619.000,00	2025
115	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. BINA ARTHA SEMESTA	1094/SP/RSUD-RAT/BLUD-BHP/XII/2025	7.742.250,00	2025
116	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. BISAWI TUMBUH SELARAS	EP-01K7GS4V03FKR3SEBFAEI	76.168.600,00	2025
117	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.SINAR RODA UTAMA	EP-01KAWEG2TZAHTZPWPBFGNN0VKK	598.068.000,00	2025
118	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.BASUCA MITRA PERDANA	1019/SP/RSUDRAT/BLUD-BHP/X/2025	966.000,00	2025
119	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.ENS PILAR MEDIKA	EP-01K7DNGQCVPEW68TE7WPHKAZM5	139.333.563,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10
120	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.ENS PILAR MEDIKA	EP-01K6MMCM5ZQ1585CCY83TYKS9F	5.069.925,00	2025
121	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.ENS PILAR MEDIKA	1047/SP/RSUD-RAT/BLUD-BHP/XI/2025	4.129.200,00	2025
122	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.ENS PILAR MEDIKA	1101/SP/RSUD-RAT/BLUD-BHP	208.680,00	2025
123	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.ENS PILAR MEDIKA	EP-01KC81EJ6PJ9K24FYP55VD	74.416.818,00	2025
124	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.GRACIA VISI PRATAMA	1100/SP/RSUDRAT/BLUD-BHP/	18.204.000,00	2025
125	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.GRACIA VISI PRATAMA	1028/SP/RSUDRAT/BLUD-BHP/	142.257.600,00	2025
126	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.GRACIA VISI PRATAMA	1029/SP/RSUDRAT/BLUD-BHP/	31.302.000,00	2025
127	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.GRACIA VISI PRATAMA	1026/SP/RSUDRAT/BLUD-BHP/	2.763.900,00	2025
128	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.GRACIA VISI PRATAMA	1027/SP/RSUDRAT/BLUD-BHP/	25.641.000,00	2025
129	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.GRACIA VISI PRATAMA	1040/SP/RSUDRAT/BLUD-BHP/	53.801.700,00	2025
130	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.GRACIA VISI PRATAMA	1039/SP/RSUDRAT/BLUD-BHP/	58.608.000,00	2025
131	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.DIAN TRIKARSA	1007/SP/RSUD RAT/BLUD-BHP	69.930.000,00	2025
132	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.DIAN TRIKARSA	1021/SP/RSUD RAT/BLUD-BHP	19.980.000,00	2025
133	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.SABA INDOMEDIKA	1015/SP/RSUD RAT/BLUD-BHP	6.260.400,00	2025
134	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.SABA INDOMEDIKA	1014/SP/RSUD RAT/BLUD-BHP	44.130.270,00	2025
135	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.SABA INDOMEDIKA	1043/SP/RSUD RAT/BLUD-BHP	3.463.200,00	2025
136	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.SABA INDOMEDIKA	1076/SP/RSUD RAT/BLUD-BHP	112.354.200,00	2025
137	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.SABA INDOMEDIKA	1077/SP/RSUD RAT/BLUD-BHP	15.384.600,00	2025
138	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.BOSMA MEDICAL INDONESIA	1089/SP/RSUD RAT/BLUD-BHP	1.260.000,00	2025
139	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.BOSMA MEDICAL INDONESIA	1079/SP/RSUD RAT/BLUD-BHP	4.100.000,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10
140	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.BOSMA MEDICAL INDONESIA	1078/SP/RSUD RAT/BLUD-BHP	45.126.360,00	2025
141	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.BOSMA MEDICAL INDONESIA	1085/SP/RSUD RAT/BLUD-BHP	6.014.080,00	2025
142	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.BOSMA MEDICAL INDONESIA	EP-01K7S4WETPJ142AHXEWY	12.432.000,00	2025
143	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.BOSMA MEDICAL INDONESIA	EP-01K7P0KPTB728KWYNS6B	75.293.520,00	2025
144	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.BOSMA MEDICAL INDONESIA	EP-01K7PKZZS1KRYAQRC3VZ	15.318.000,00	2025
145	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.BOSMA MEDICAL INDONESIA	1041/SP/RSUD RAT/BLUD-BHP	27.531.463,00	2025
146	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.BOSMA MEDICAL INDONESIA	EP-01KC0QN72QHYPWXWNSI	10.656.000,00	2025
147	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.BOSMA MEDICAL INDONESIA	EP-01KC48C02TJKRPJ0KXGRE	21.689.400,00	2025
148	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. PARIT PADANG GLOBAL	1017/SP/RSUD RAT/BLUD-BHP	6.660.000,00	2025
149	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. PARIT PADANG GLOBAL	EP-01K82GDXWQTGT999ATNF	9.263.394,00	2025
150	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. PARIT PADANG GLOBAL	1018/SP/RSUD RAT/BLUD-BHP	11.354.729,00	2025
151	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. PARIT PADANG GLOBAL	EP-01K7NZM0TV3EG6GNGDNI	16.063.920,00	2025
152	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. KARUNIA ABADI INDONESIA	711/SP/RSUD RAT/BLUD-BHP/	98.364.676,00	2025
153	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. KARUNIA ABADI INDONESIA	1105/SP/RSUD-RAT/BLUD-BHP	7.137.300,00	2025
154	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. KARUNIA ABADI INDONESIA	711/SP/RSUD RAT/BLUD-BHP/	140.173.557,00	2025
155	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. KARUNIA ABADI INDONESIA	1023/SP/RSUD-RAT/BLUD-BHP	20.346.300,00	2025
156	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. KARUNIA ABADI INDONESIA	711/SP/RSUD RAT/BLUD-BHP/	92.795.155,00	2025
157	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. KARUNIA ABADI INDONESIA	711/SP/RSUD RAT/BLUD-BHP/	84.505.138,00	2025
158	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. KARUNIA ABADI INDONESIA	711/SP/RSUD RAT/BLUD-BHP/	7.670.100,00	2025
159	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. BIOGEN SCIENTIFIC	1031/SP/RSUD RAT/BLUD-BHP	38.425.980,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
160	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. BIOGEN SCIENTIFIC	1039/SP/RSUD RAT/BLUD-BHP	30.808.050,00	2025
161	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. BIOGEN SCIENTIFIC	1035/SP/RSUD RAT/BLUD-BHP	22.053.480,00	2025
162	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. BIOGEN SCIENTIFIC	1046/SP/RSUD RAT/BLUD-BHP	35.952.900,00	2025
163	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. BIOGEN SCIENTIFIC	1033/SP/RSUD RAT/BLUD-BHP	11.544.000,00	2025
164	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. BIOGEN SCIENTIFIC	1037/SP/RSUD RAT/BLUD-BHP	4.922.850,00	2025
165	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. BIOGEN SCIENTIFIC	199/SPK/RSUD RAT/BLUD-BHP	158.390.340,00	2025
166	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT. BIOGEN SCIENTIFIC	1082/SP/RSUD RAT/BLUD-BHP	12.418.680,00	2025
167	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.ENSEVAL PUTERA MEGATRANDING	EP-01K9P4HM8JQCFSWBZNC	22.999.979,00	2025
168	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.ENSEVAL PUTERA MEGATRANDING	EP-01K9P3MQ75B55QE0Q14C	2.867.130,00	2025
169	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.ENSEVAL PUTERA MEGATRANDING	1038/SP/RSUD-RAT/BLUD-BHP	8.883.099,00	2025
170	Pelayanan Non Medik	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Pengadaan Bahan Habis Pakai-BLUD)	PT.SMART GLOBAL MEDIKA INDONESI	1102/SP/RSUD-RAT/BLUD-BHP	3.779.994,00	2025
171	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA	176/SPK/RSUD-RAT/BLUD-OBAT/X/2025	417.478.597,00	2025
172	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA	208/SPK/RSUD-RAT/BLUD-OBAT/XI/2025	283.012.039,00	2025
173	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA	210/SPK/RSUD-RAT/BLUD-OBAT/XII/2025	275.475.056,00	2025
174	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	153/SPK/RSUD-RAT/BLUD-OBAT/IX/2025	249.052.550,00	2025
175	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1084/SP/RSUD-RAT/BLUD-OBAT/X/2025	6.995.642,00	2025
176	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	190/SPK/RSUD-RAT/BLUD-OBAT/XI/2025	436.294.939,00	2025
177	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	1073/SP/RSUD RAT/BLUD-OBAT/XII/2025	6.174.535,00	2025
178	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. ANTAR MITRA SEMBADA	1072/SP/RSUD-RAT/BLUD-OBAT/X/2025	3.526.426,00	2025
179	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. ANTAR MITRA SEMBADA	1049/SP/RSUD RAT/BLUD-OBAT/X/2025	10.767.355,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10
180	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. APOTEK KIMIA FARMA	DES	268.706,00	2025
181	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. BINA SAN PRIMA	1057/SP/RSUD-RAT/BLUD-OBAT/X/2025	8.391.600,00	2025
182	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. BINA SAN PRIMA	1099/SP/RSUD-RAT/BLUD-OBAT/XI/2025	7.832.160,00	2025
183	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING	178/SPK/RSUD-RAT/BLUD-OBAT/X/2025	498.043.700,00	2025
184	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING	202/SPK/RSUD-RAT/BLUD-OBAT/X/2025	268.261.205,00	2025
185	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING	1087/SP/RSUD-RAT/BLUD-OBAT/XII/2025	32.702.966,00	2025
186	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. KIMIA FARMA TRADING N DISTRIBUTION	165/SPK/RSUD-RAT/BLUD-OBAT/IX/2025	76.980.990,00	2025
187	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. KIMIA FARMA TRADING N DISTRIBUTION	170/SPK/RSUD RAT/BLUD-OBAT/X/2025	403.611.495,00	2025
188	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. KIMIA FARMA TRADING N DISTRIBUTION	192/SPK/RSUD RAT/BLUD-OBAT/XI/2025	356.968.198,00	2025
189	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. KIMIA FARMA TRADING N DISTRIBUTION	194/SPK/RSUD RAT/BLUD-OBAT/XII/2025	216.831.117,00	2025
190	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. MENSA BINASUKSES	1050/SP/RSUD RAT/BLUD-OBAT/XI/2025	4.553.664,00	2025
191	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. MERAPI UTAMA PHARMA	1048/SP/RSUD RAT/BLUD-OBAT/IX/2025	25.448.748,00	2025
192	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. MERAPI UTAMA PHARMA	167/SPK/RSUD RAT/BLUD-OBAT/X/2025	140.158.876,00	2025
193	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. MERAPI UTAMA PHARMA	184/SPK/RSUD RAT/BLUD-OBAT/XI/2025	137.964.647,00	2025
194	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL	172/SPK/RSUD RAT/BLUD-OBAT/X/2025	60.358.021,00	2025
195	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL	186/SPK/RSUD RAT/BLUD-OBAT/XI/2025	94.637.465,00	2025
196	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL	1072/SP/RSUD RAT/BLUD-OBAT/XII/2025	4.160.835,00	2025
197	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. OMEGA SURYA ANUGERAH	1028/SP/RSUD-RAT/BLUD-OBAT/X/2025	773.359,00	2025
198	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. PARIT PADANG GLOBAL	180/SPK/RSUD-RAT/BLUD-OBAT/X/2025	55.196.238,00	2025
199	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. PARIT PADANG GLOBAL	204/SPK/RSUD-RAT/BLUD-OBAT/XI/2025	484.521.270,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	10
200	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. PARIT PADANG GLOBAL	206/SPK/RSUD-RAT/BLUD-OBAT/XII/2025	309.436.099,00	2025
201	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. PENTA VALENT	149/SPK/RSUD-RAT/BLUD-OBAT/IX/2025	139.513.247,00	2025
202	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. PENTA VALENT	1083/SP/RSUD RAT/BLUD-OBAT/X/2025	43.556.289,00	2025
203	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. PENTA VALENT	188/SPK/RSUD RAT/BLUD-OBAT/XI/2025	104.069.026,00	2025
204	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. PENTA VALENT	1090/SP/RSUD-RAT/BLUD-OBAT/XII/2025	8.769.421,00	2025
205	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. PRIMA MULIA MANDIRI	1029/SP/RSUD-RAT/BLUD-OBAT/XI/2025	3.047.616,00	2025
206	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. PRIMA MULIA MANDIRI	NOV	15.018.300,00	2025
207	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. PRIMA MULIA MANDIRI	DES	16.317.000,00	2025
208	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. TANDZA INDAH MEDIKA	1026/SP/RSUD-RAT/BLUD-OBAT/X/2025	11.794.860,00	2025
209	Pelayanan Non Medik	Pelayanan Farmasi	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	BELANJA OBAT-OBATAN	PT. TANDZA INDAH MEDIKA	1088/SP/RSUD-RAT/BLUD-OBAT/XI/2025	4.418.522,00	2025
210	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non AS	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan (Premi 4%) bagi Pegawai Non Asn	BPJS KES	-	40.574.496,00	2025
211	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan (Premi 4%) bagi Pegawai PNS	BPJS KES	-	26.404.433,00	2025
212	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.02.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan (Premi 4%) bagi Pegawai PPPK	BPJS KES	-	64.703.616,00	2025
213	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN			231.275.088,00	2025
							JUMLAH	**29.343.296.881,00**	

LAMPIRAN 9-E

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	279.731.200,00
2	Penambahan Utang 2025	7.528.529.224,00
	Total Utang Belanja	**7.808.260.424,00**

A. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD (BLUD) TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD Pembayaran Isi Ulang Tabung Oksigen Liquid Bulan Mei-Juni TA.2024 RSJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau T.A 2024	CV.IDEALIS ALAM GAS	SP/624/RSJKO-EHD/2024	279.731.200,00	2024
2	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Mei 2025	Dualime Industries, PT	SP/160/RSJKO-EHD/2025	33.275.540,00	2025
3	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja Obat Reguler) Bulan Mei 2025	Enseval Putera Megatrading, PT	SP/158/RSJKO-EHD/2025	107.332.423,00	2025
4	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Mei 2025	Espana Inti Perkasa, PT	SP/161/RSJKO-EHD/2025	49.550.000,00	2025
5	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Mei 2025	Oasis Mitra Alkes, PT	SP/163/RSJKO-EHD/2025	25.902.600,00	2025
6	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja Obat Reguler) Bulan Mei 2025	Parit Padang Global, PT	SP/159/RSJKO-EHD/2025	20.861.654,00	2025
7	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Mei 2025	Pelangi Rapha Semesta, PT	SP/164/RSJKO-EHD/2025	Rp17.040.500,00	2025
8	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Mei 2025	Wido Abadi Perkasa, PT	SP/165/RSJKO-EHD/2025	Rp4.455.000,00	2025
9	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Juni 2025	Amanah Jaya Bersama, PT	SP/196/RSJKO-EHD/2025	Rp63.701.932,00	2025
10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Juni 2025	Bintang Shafwan, PT	SP/197/RSJKO-EHD/2025	Rp5.700.000,00	2025
11	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja Obat Reguler) Bulan Juni 2025	Enseval Putera Megatrading, PT	SP/194/RSJKO-EHD/2025	Rp78.333.377,00	2025
12	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Juni 2025	Enseval Putera Megatrading, PT	SP/198/RSJKO-EHD/2025	Rp6.891.891,00	2025
13	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Juni 2025	Espana Inti Perkasa, PT	SP/199/RSJKO-EHD/2025	Rp37.961.000,00	2025
14	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Juni 2025	Galoeh Husada Farma, PT	SP/200/RSJKO-EHD/2025	Rp61.425.550,00	2025
15	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja Obat Reguler) Bulan Juni 2025	Parit Padang Global, PT	SP/195/RSJKO-EHD/2025	Rp38.448.145,00	2025
16	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Juni 2025	Pelangi Rapha Semesta, PT	SP/200/RSJKO-EHD/2025	Rp54.885.340,00	2025
17	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Juni 2025	Wido Abadi Perkasa, PT	SP/201/RSJKO-EHD/2025	4.455.000,00	2025
18	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja Obat Reguler) Bulan Juli 2025	Enseval Putera Megatrading, PT	SP/222/RSJKO-EHD/2025	151.161.648,00	2025
19	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Juli 2025	Espana Inti Perkasa, PT	SP/215/RSJKO-EHD/2025	43.830.000,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
20	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja Obat Reguler) Bulan Juli 2025	Kimia Farma, PT	SP/223/RSJKO-EHD/2025	109.001.990,00	2025
21	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Juli 2025	Millennium Pharmacon International, PT	SP/217/RSJKO-EHD/2025	16.410.000,00	2025
22	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Juli 2025	Oasis Mitra Alkes, PT	SP/218/RSJKO-EHD/2025	24.843.955,00	2025
23	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja Obat Reguler) Bulan Juli 2025	Parit Padang Global, PT	SP/224/RSJKO-EHD/2025	106.102.483,00	2025
24	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Juli 2025	Parit Padang Global, PT	SP/219/RSJKO-EHD/2025	50.104.400,00	2025
25	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Juli 2025	Pelangi Rapha Semesta, PT	SP/220/RSJKO-EHD/2025	51.477.120,00	2025
26	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Juli 2025	Wido Abadi Perkasa, PT	SP/221/RSJKO-EHD/2025	4.455.000,00	2025
27	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Agustus 2025	Amanah Jaya Bersama, PT	SP/229/RSJKO-EHD/2025	56.720.066,00	2025
28	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja Obat Reguler) Bulan Agustus 2025	Enseval Putera Megatrading, PT	SP/234/RSJKO-EHD/2025	206.474.848,00	2025
29	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Agustus 2025	Enseval Putera Megatrading, PT	SP/228/RSJKO-EHD/2025	1.376.400,00	2025
30	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Agustus 2025	Espana Inti Perkasa, PT	SP/231/RSJKO-EHD/2025	42.528.500,00	2025
31	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Agustus 2025	Galoeh Husada Farma, PT	SP/233/RSJKO-EHD/2025	69.606.900,00	2025
32	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja Obat Reguler) Bulan Agustus 2025	Kimia Farma, PT	SP/227/RSJKO-EHD/2025	47.509.020,00	2025
33	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Agustus 2025	Oasis Mitra Alkes, PT	SP/230/RSJKO-EHD/2025	2.330.000,00	2025
34	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja Obat Reguler) Bulan Agustus 2025	Parit Padang Global, PT	SP/235/RSJKO-EHD/2025	153.288.035,00	2025
35	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Agustus 2025	Pelangi Rapha Semesta, PT	SP/232/RSJKO-EHD/2025	46.570.172,00	2025
36	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Agustus 2025	Wido Abadi Perkasa, PT	SP/226/RSJKO-EHD/2025	11.125.000,00	2025
37	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan September 2025	Amanah Jaya Bersama, PT	SP/258/RSJKO-EHD/2025	91.714.560,00	2025
38	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja Obat Reguler) Bulan September 2025	Enseval Putera Megatrading, PT	SP/264/RSJKO-EHD/2025	122.354.825,00	2025
39	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan September 2025	Enseval Putera Megatrading, PT	SP/254/RSJKO-EHD/2025	3.211.600,00	2025
40	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan September 2025	Espana Inti Perkasa, PT	SP/256/RSJKO-EHD/2025	104.089.200,00	2025
41	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan September 2025	Galoeh Husada Farma, PT	SP/261/RSJKO-EHD/2025	9.004.320,00	2025
42	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan September 2025	Interskala Sehat Sejahtera, PT	SP/262/RSJKO-EHD/2025	199.800.000,00	2025
43	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja Obat Reguler) Bulan September 2025	Kimia Farma, PT	SP/265/RSJKO-EHD/2025	141.152.252,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
44	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan September 2025	Millennium Pharmacon International, PT	SP/260/RSJKO-EHD/2025	31.270.800,00	2025
45	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan September 2025	Oasis Mitra Alkes, PT	SP/257/RSJKO-EHD/2025	29.171.800,00	2025
46	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja Obat Reguler) Bulan September 2025	Parit Padang Global, PT	SP/266/RSJKO-EHD/2025	62.634.764,00	2025
47	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan September 2025	Parit Padang Global, PT	SP/263/RSJKO-EHD/2025	49.880.000,00	2025
48	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan September 2025	Pelangi Rapha Semesta, PT	SP/259/RSJKO-EHD/2025	30.464.024,00	2025
49	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan September 2025	Wido Abadi Perkasa, PT	SP/255/RSJKO-EHD/2025	8.910.000,00	2025
50	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Oktober 2025	Amanah Jaya Bersama, PT	SP/274/RSJKO-EHD/2025	42.110.000,00	2025
51	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja Obat Reguler) Bulan Oktober 2025	Enseval Putera Megatrading, PT	SP/278/RSJKO-EHD/2025	19.884.400,00	2025
52	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Oktober 2025	Espana Inti Perkasa, PT	SP/275/RSJKO-EHD/2025	25.540.000,00	2025
53	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja Obat Reguler) Bulan Oktober 2025	Kimia Farma, PT	SP/279/RSJKO-EHD/2025	13.864.150,00	2025
54	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Oktober 2025	Oasis Mitra Alkes, PT	SP/276/RSJKO-EHD/2025	57.606.780,00	2025
55	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja Obat Reguler) Bulan Oktober 2025	Parit Padang Global, PT	SP/280/RSJKO-EHD/2025	19.298.064,00	2025
56	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Oktober 2025	Pelangi Rapha Semesta, PT	SP/277/RSJKO-EHD/2025	139.866.040,00	2025
57	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan November 2025	Amanah Jaya Bersama, PT	SP/298/RSJKO-EHD/2025	25.792.966,00	2025
58	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja Obat Reguler) Bulan November 2025	Enseval Putera Megatrading, PT	SP/300/RSJKO-EHD/2025	140.661.934,00	2025
59	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan November 2025	Espana Inti Perkasa, PT	SP/299/RSJKO-EHD/2025	134.198.000,00	2025
60	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan November 2025	Interskala Sehat Sejahtera, PT	SP/295/RSJKO-EHD/2025	199.800.000,00	2025
61	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja Obat Reguler) Bulan November 2025	Marga Nusantara Jaya, PT	SP/301/RSJKO-EHD/2025	10.000.000,00	2025
62	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja Obat Reguler) Bulan November 2025	Millennium Pharmacon International, PT	SP/302/RSJKO-EHD/2025	19.466.850,00	2025
63	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan November 2025	Oasis Mitra Alkes, PT	SP/294/RSJKO-EHD/2025	8.067.380,00	2025
64	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan November 2025	Pelangi Rapha Semesta, PT	SP/297/RSJKO-EHD/2025	25.197.700,00	2025
65	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan November 2025	Wido Abadi Perkasa, PT	SP/296/RSJKO-EHD/2025	4.455.000,00	2025
66	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Desember 2025	Amanah Jaya Bersama, PT	SP/289/RSJKO-EHD/2025	49.128.220,00	2025
67	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja Obat Reguler) Bulan Desember 2025	Enseval Putera Megatrading, PT	SP/284/RSJKO-EHD/2025	22.998.400,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
68	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Desember 2025	Espana Inti Perkasa, PT	SP/291/RSJKO-EHD/2025	114.956.000,00	2025
69	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Desember 2025	Interskala Sehat Sejahtera, PT	SP/292/RSJKO-EHD/2025	399.600.000,00	2025
70	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja Obat Reguler) Bulan Desember 2025	Kimia Farma, PT	SP/286/RSJKO-EHD/2025	44.569.500,00	2025
71	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja Obat Reguler) Bulan Desember 2025	Millennium Pharmacon International, PT	SP/288/RSJKO-EHD/2025	9.657.324,00	2025
72	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Desember 2025	Oasis Mitra Alkes, PT	SP/283/RSJKO-EHD/2025	59.618.500,00	2025
73	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja Obat Reguler) Bulan Desember 2025	Parit Padang Global, PT	SP/285/RSJKO-EHD/2025	72.582.158,00	2025
74	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Desember 2025	Pelangi Rapha Semesta, PT	SP/293/RSJKO-EHD/2025	40.388.500,00	2025
75	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja Obat Reguler) Bulan Desember 2025	United Dico Citas, PT	SP/290/RSJKO-EHD/2025	29.653.251,00	2025
76	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Pembayaran Belanja Pembelian Obat & BHP Medis 2025 (Belanja BHP Reguler) Bulan Desember 2025	Wido Abadi Perkasa, PT	SP/287/RSJKO-EHD/2025	8.910.000,00	2025
77	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Belanja Evakuasi dan Rujukan Parsial, Biaya Tiket Roro tanggal 16 sd 31 Desember 2025	-	-	1.220.276,00	2025
78	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Belanja Evakuasi & Rujukan Parsial, Evakuasi Pasien Jiwa tanggal 16 sd 31 Desember 2025	-	-	253.250,00	2025
79	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Belanja Evakuasi & Rujukan Parsial, Pengantaran Sampel dan Pengambilan Darah di PMI bulan Desember 2025	-	-	450.000,00	2025
80	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Belanja Evakuasi & Rujukan Parsial, Kegiatan Donor Darah Diluar Gedung RS tanggal 18 Desember 2025	-	-	1.200.000,00	2025
81	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Belanja Isi Ulang Oksigen (Liquid & Tabung) 2025, Bulan Mei 2025	CV.IDEALIS ALAM GAS	SP/303/RSJKO-EHD/2025	168.270.400,00	2025
82	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Belanja Isi Ulang Oksigen (Liquid & Tabung) 2025, Bulan Juli 2025	CV.IDEALIS ALAM GAS	SP/304/RSJKO-EHD/2025	180.965.200,00	2025
83	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Belanja Isi Ulang Oksigen (Liquid & Tabung) 2025, Bulan September 2025	CV.IDEALIS ALAM GAS	SP/305/RSJKO-EHD/2025	178.546.000,00	2025
84	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Belanja Isi Ulang Oksigen (Liquid & Tabung) 2025, Bulan Oktober 2025	CV.IDEALIS ALAM GAS	SP/306/RSJKO-EHD/2025	179.240.400,00	2025
85	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Belanja Isi Ulang Oksigen (Liquid & Tabung) 2025, Bulan Desember 2025	CV.IDEALIS ALAM GAS	SP/307/RSJKO-EHD/2025	174.581.200,00	2025
86	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Belanja Jasa Pelayanan Pasien bulan September Tahun 2025 (Jasa Pelayanan BPJS)	-	-	706.378.523,00	2025
87	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Belanja Jasa Pelayanan Pasien bulan September Tahun 2025 (Jasa Pelayanan Umum)	-	-	53.321.382,00	2025
88	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Belanja Jasa Pelayanan Pasien bulan Oktober Tahun 2025 (Jasa Pelayanan BPJS)	-	-	388.393.275,00	2025
89	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Belanja Jasa Pelayanan Pasien bulan Oktober Tahun 2025 (Jasa Pelayanan Umum)	-	-	48.782.535,00	2025
90	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Belanja Jasa Pelayanan Pasien bulan November Tahun 2025 (Jasa Pelayanan BPJS)	-	-	23.690.908,00	2025
91	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Belanja Jasa Pelayanan Pasien bulan NovemberTahun 2025 (Jasa Pelayanan Umum)	-	-	70.201.048,00	2025
92	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Belanja Jasa Pelayanan Pasien bulan Desember Tahun 2025 (Jasa Pelayanan BPJS)	-	-	845.805.503,00	2025
93	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Belanja Jasa Pelayanan Pasien bulan Desember Tahun 2025 (Jasa Pelayanan Umum)	-	-	78.599.573,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
94	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Belanja Jasa Tenaga Ahli Tim Pengamanan Pembangunan Strategis RSJKO EHD Periode bulan Juni s.d Juli 2025	ADE PARDI	-	1.425.000,00	2025
95	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Belanja Jasa Tenaga Ahli Pendamping Hukum Pengadaan Prasarana RSJKO EHD, Periode bulan Agustus s.d Desember 2025	OLAN LAURENCE H PASA	-	540.000,00	2025
							JUMLAH	**7.808.260.424,00**	

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	-
2	Penambahan Utang 2025	25.624.968.320,89
	Total Utang Belanja	**25.624.968.320,89**

A. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	4	5	*6*	*7*	8	*9*	*10*
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenagan Provinsi	5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	Dibayar 100% Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Teknik Sipil Transportasi Paket Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak Kota Tanjungpinang	CV EXA ENGINEERING CONSULTANT	ADD/01.04.01/SP-KWP/PWS/PUPP-BM/APBD/2025	166.495.218,00	2025
2	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Sub Keg Pemeliharaan,Perawatan,& Pemeliharaan Berkala Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi - Dibayar Termin 74% Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat-Gedung Kantor Pemeliharaan Renovasi Gedung Perkantoran Prov Kepri di Pulau Dompak,Kota Tanjungpinang	BENGKEL SPESIALIS KEPRI CV	9.2/add-01/SP-HS/DPUPP-CK/PPK.5/APBD/X/2025	1.678.101.565,15	2025
3	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Berkala Jalan	5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Kota Tanjungpinang	CV. BUDI PUTRA INDONESIA	08.01/SP-HS/FSK/PUPP-BM/PPK/APBD/VI/2025	748.615.308,00	2025
4	Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Sub Kegiatan Pembangunan Pemanfaatan, Pelestarian& Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi-Dibayar 100% Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Paket Pengawasan Teknis Pembangunan RS Angkatan Darat Bengkong Kota Batam (Lanjutan)	PRIMA KREASI ARSINDO CONSULTANT CV	6/SPK/PGWS-PL/DPUPP-CK/PPK.1/APBD/VII/2025	99.568.000,00	2025
5	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	Pengawasan Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas	PT. BENTAN SONDONG	11.01/SPK/PWS-PL/BM/PUPP/APBD/VIII/2025	99.699.900,00	2025
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	5.1.02.01.04.0371	Belanja Jasa Konsultan Pengawas Rekayasa Jasa Pengawas	Belanja Peralatan Dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Lain	PT. NUANSA BINTAN	EP-01K9XNA6QHBE2H8EE8T5VS6NE7	29.953.350,00	2025
7	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	Dibayar Termin 100% Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Paket Konsultan Individual Pengawas Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Di Kota Tanjungpinang Dan Kabupaten Bintan	NULY AFRIZAL. ST	01.02/SPK/KI/PUPP-BM/APBD/V/2025	49.994.400,00	2025
8	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Review Desain Pembangunan Jembatan Batam - Bintan	CV. DIMIANO KONSULTAN	2.02/SP-KL/DED/PUPP-BM/APBD/VII/2025	155.652.081,00	2025
9	Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi BangunanGedung	Dibayar Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan)	PT.MULTI FORMA RIAU KONSULTAN	01/SP.PWS/DPUPP-CK/PPK.1/APBD/VII/2025	243.989.000,00	2025
10	Penyelenggaran Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Dibayar Termin 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Nasihat Dan Pra Desain Arsitektural Paket Pekerjaan Ded Pembangunan Monumen Tugu Bahasa Nasional Di Pulau Penyengat	SARANABUDI PRAKARSARIPTA	ADD.1/04.3/SP.PRC/DPUPP-CK/PPK.4/APBD/VI/2025	423.989.232,00	2025
11	Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Dibayar Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Rehabilitasi Mesjid Baitul Karim Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Karimun, Kabupaten Karimun	CALVINDAM JAYA ENGINEERING CONSULTANT PT	04.6/SP.PRC-PL/DPUPP-CK/PPK.2/APBD-P/XI/2025	99.740.604,00	2025
12	Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Dibayar Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana Dan Prasarana Gedung Pemuda Di Kabupaten Karimun	CALVINDAM JAYA ENGINEERING CONSULTANT PT	04.7/SP.PRC-PL/DPUPP-CK/PPK.2/APBD-P/XI/2025	87.641.604,00	2025
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Map Dinas	CV. CAHAYA BINTAN	027/10.01.052/SP-PPK.1/PUPP.1/2025	29.250.000,00	2025
14	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	Belanja Pemeliharaan Tanah - Lapangan untuk Taman Median dan Pedestrian	CV. BENGKEL KREASINDO KEPRI	EP-01JVKJF681ZXF4H5YJHRNPCVPB	114.240.000,00	2025
15	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	DED Pembangunan Flyover Simpang Kota Piring	CV. DIMIANO KONSULTAN	1.02/SP-KL/DED/PUPP-BM/APBD/VII/2025	664.269.800,00	2025
16	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Dusun 2 Parit Gantung Desa Sei Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun	PT. CALVINDAM JAYA EC	12.02/SPK/PERNC-PL/BM/PUPP/APBD-P/XI/2025	99.670.400,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
17	Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Perencanaan Normalisasi Saluran Utama di Kecamatan Toapaya dan Teluk Bintan Kabupaten Bintan	PT. CALVINDAM JAYA ENGINEERING CONSULTANT	01/SPK/PRC-PL/DPUPP-SDA/PPK.1/APBD-P/X/2025	44.689.401,42	2025
18	Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Perencanaan Teknis Drainase Desa Pangke Barat, Kecamatan Merah Barat Kabupaten Karimun	PT. CALVINDAM JAYA ENGINEERING CONSULTANT	08/SPK/PRC-PL/DPUPP-SDA/PPK.1/APBD-P/X/2025	85.877.956,08	2025
19	Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	5.1.02.01.04.0545	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	Dibayar Termin 100% Belanja Gedung Dan Bangunan - Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Taman Pekerjaan Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan)	KARYA GEMILANG ABADI	01/SPK/FSK/DPUPP-CK/PPK.8/APBD/VI/2025, ADD-1/01/SPK/FSK/DPUPP-CK/PPK.8/APBD/IX/2025,	1.331.742.020,00	2025
20	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Karimun	CV. CAHAYA HAVIZA	ADD.02.13.01/SP-HS/FSK/PUPP-BM/PPK/APBD/X/2025,	572.383.400,00	2025
21	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan	PT. EKA BALINGGA	ADD.02.04.01/SP-HS/FSK/PUPP-BM/PPK/APBD/XII/2025	949.777.529,00	2025
22	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Sub Keg Pembangunan,Pemanfaatan,Pelestarian & Pembongkoran Bangunan Gedung Utk Kepentingan Strategis Daerah Prov - Dibayar Termin 100% Belanja Jasa Arsitektur Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Persatuan Istri Tentara (Persit) di KOREM 033 WIRA PRATAMA Tanjungpinang	EMBUN CONSULTANT CV	5/SPK/PGWS-PL/DPUPP-CK/PPK.1/APBD/VIII/2025	79.504.000,00	2025
23	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	Pengawasan Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Karimun	CV.SKALA MULTI REKAYASA KONSULTAN	12.01/SPK/PWS-PL/BM/PUPP/APBD/IX/2025	49.700.250,00	2025
24	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	Pengawasan Teknis Rekonstruksi JL. Pelantar II Kota Tanjungpinang	CV. GLOBAL KREATIF KONSULTAN	09.01/SPK/PWS-PL/BM/PUPP/APBD/IX/2025	99.789.000,00	2025
25	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Sub Keg Pembangunan,Pemanfaatan, Pelestarian & Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategi Daerah Provinsi - Dibayar Termin 100% Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur- & Pra Desain Arsitektural DED Pembangunan Perkantoran Terpadu Pemerintah Prov Kepri di Pulau Dompak	PT PRIMEGA SANIYYA LESTARI-CV VISTATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT,KSO	06.4/SP.DED/DPUPP-CK/PPK.4/APBD/VI/2025	1.007.044.748,00	2025
26	Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	Pengawasan Normalisasi dan Batu Miring Kampung Purwodadi RT 2 RW 9 Kelurahan Sei Lekop Bintan Timur Kab Bintan	DE ROEPA ARSITEK CV	8.79/SPK/PWS-PL/DPUPP-SDA/APBD/X/2025	17.998.650,00	2025
27	Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Normalisasi dan Batu Miring Kampung Purwodadi RT 2 RW 9 Kelurahan Sei Lekop Bintan Timur	LALUNA ARTHA KENCANA CV	8.79/ADD.1/SPK/FSK-PL/DPUPP-SDA/APBD/X/2025	199.829.730,17	2025
28	Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Perencanaan Pembangunan Tembok Penahan Tebing/Pemecah Ombak Pantai Desa Pengadah. Kec. Bunguran Timur Laut Kab. Natuna	CV. ELEMEN GEOMETRI KONSULTAN	03/SPK/PRC-PL/DPUPP-SDA/PPK.1/APBD-P/X/2025	18.469.763,53	2025
29	Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Perencanaan Pembangunan Batu Miring Sungai Desa Ceruk dan Sungai Silas, belakang Kantor Desa Kelanga, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kab. Natuna	CV. BRAWIJAYA TEKNIK KONSULTAN	04/SPK/PRC-PL/DPUPP-SDA/PPK.1/APBD-P/X/2025	35.054.096,77	2025
30	Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Perencanaan Normalisasi Sungai/Saluran Utama Area Perkebunan Apak Undong, Desa Seleman. Kec. Bunguran Timur Laut Kab. Natuna	CV. ELEMEN GEOMETRI KONSULTAN	05/SPK/PRC-PL/DPUPP-SDA/PPK.1/APBD-P/X/2025	11.954.947,31	2025
31	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	Pengawasan Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Di Kabupaten Bintan	CV. TIGA PILAR ABADI	06.01/SPK/PWS-PL/BM/PUPP/APBD/VI/2025	99.844.500,00	2025
32	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Berkala Jalan	5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	Pengawasan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Di Kota Tanjungpinang	CV. GLOBAL KREATIF KONSULTAN	01.01/SPK/PWS-PL/BM/PUPP/APBD/VI/2025	99.388.800,00	2025
33	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangurusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Paket Rehablitasi Gedung UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan	Pemeliharaan Gedung Kantor Paket Rehabilitasi Gedung UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Dan Peralatan	CV. RESQI SUKSES BERKARYA	1/SPK/FSK-PL/UPTDLBKP/PPK.30/DPUPP/XI/2025	222.269.662,30	2025
34	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangurusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Arsitektur Paket Pengawasan Teknis Rehablitasi Gedung UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan	Pengawasan Teknis Pemeliharaan Gedung Kantor Paket Rehabilitasi Gedung UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Dan Peralatan	CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN	1/SPK/PGWS-PL/UPTDLBKP/PPK.30/DPUPP /XI/2025	10.471.103,84	2025
35	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga	PT. NUSANTARA MULTI KREASI KONSULTAN	13.01/SPK/PWS-PL/BM/PUPP/APBD-P/X/2025	99.687.100,00	2025
36	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Sub Keg Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian & Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Prov - Dibayar Termin 100% Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Paket Renovasi Ruang Samsat Batam Centre Lt 3 Graha Kepri, Kota Batam	ANUGERAH CIPTA MANDI	01/SPK/FSK/DPUPP-CK/PPK.7/APBD/X/2025 , tanggal 16 Oktober 2025 add1 01/ADD-1/FSK/DPUPP-CK/PPK.7/APBD/XII/2025, tanggal 02 Desember 2025	1.011.144.740,00	2025
37	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	Sub Keg Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Lintas Kab/Kota - Dibayar Termijn 100% Belanja Pengawasan Teknik Sipil Air Paket Pengawasan Teknis Pengembangan Jaringan Perpipaan Di Kawasan LANUDAL Tanjungpinang	BERGIN DWI DIMENSI CV	4.6/SPK/PWS/DPUPP-CK/PPK.1/APBD/VII/2025	79.823.653,78	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
38	Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Sub Kegiatan Pemeliharaan,Perawatan,& Pemeliharaan Berkala Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Prov - Dibayar Termin 100% Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Paket Pemeliharaan,Interor dan Pengadaan Meubeler pada Gedung Ex Bintan Expo	HALIFA BERKAH UTAMA CV	04.10/SP.FSK-PL/DPUPP-CK/PPK.2/APBD-P/XI/2025	374.749.798,38	2025
39	Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerahkabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan StrategisLainnya	5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Pariwisata, Sistem Perkotaan Nasional dan Strategis Lainnya Dibayar Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Kawasan Kota Lama (Jl. Pos - Jl. Pasar Ikan - Jl. Pasar Baru) Kota Tanjungpinang	ALMATRA BUANA, CV	4.2/PRC.KL/CK/PPK.4/APBD-P/XI/2025	49.439.170,00	2025
40	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan September, Oktober dan Nopember 2025	PT BAKRI KARYA SERVISUTAMA	EP-01JW7ZYFD9G22XV1DH0QPNVA05	118.200.291,00	2025
41	Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	Pengawasan Normalisasi Saluran Utama di Kecamatan Toapaya dan Teluk Bintan Kabupaten Bintan	CV. BERGIN DWI DIMENSI	07/SPK/PWS-PL/DPUPP-SDA/PPK.4/APBDP/XI/2025	34.872.426,00	2025
42	Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	Pengawasan Pembangunan Batu Miring Sungai Desa Ceruk dan Sungai Silas, belakang Kantor Desa Kelanga, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kab. Natuna	CV. ELEMEN GEOMETRI KONSULTAN	06/SPK/PWS-PL/DPUPP-SDA/PPK.3/APBD-P/XI/2025	29.947.800,00	2025
43	Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Normalisasi Sungai/Saluran Utama Area Perkebunan Apak Undong, Desa Seleman. Kec. Bunguran Timur Laut Kab. Natuna	CV. RAJA PUTRA BERTUAH	08/SPK/FSK-PL/DPUPP-SDA/PPK.3/APBD-P/XI/2025	169.544.429,39	2025
44	Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	Pengawasan Pembangunan Tembok Penahan Tebing/Pemecah Ombak Pentai Desa Pengadah. Kec. Bunguran Timur Laut Kab. Natuna	CV. ARJUNA CONSULT	05/SPK/PWS-PL/DPUPP-SDA/PPK.3/APBD-P/XI/2025	15.895.200,00	2025
45	Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Perencanaan Normalisasi Saluran Utama di Kecamatan Kundur Utara dan Kundur Barat Kabupaten Karimun	CV. BERGIN DWI DIMENSI	02/SPK/PRC-PL/DPUPP-SDA/PPK.1/APBD-P/X/2025	44.933.601,42	2025
46	Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Perencanaan Pembangunan Pintu Air Dusun 4 Desa Sebesi Kec. Kundur	CV. TIGA PILAR ABADI	07/SPK/PRC-PL/DPUPP-SDA/PPK.1/APBD-P/X/2025	18.881.366,40	2025
47	Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Perencanaan Pembangunan Batu Miring Sungai Parit Jepun Jl. Muharal Kebun Pinang Rt.02 Rw.03 Kel. Gading Sari Kec. Kundur Kab. Karimun Kundur Karimun	CV. TIGA PILAR ABADI	06/SPK/PRC-PL/DPUPP-SDA/PPK.1/APBD-P/X/2025	17.610.416,20	2025
48	Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Normalisasi Saluran Utama jalan gesek KM 19 desa toapaya selatan kecamatan toapaya Kabupaten Bintan	CV. JASTINDO GRADANA	12/SPK/FSK-PL/DPUPP-SDA/PPK.4/APBD-P/XI/2025	178.927.102,68	2025
49	Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Normalisasi Saluran Utama Kampung Tiram Desa Penaga Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan	CV. JASTINDO GRADANA	13/SPK/FSK-PL/DPUPP-SDA/PPK.4/APBD-P/XI/2025	178.870.035,36	2025
50	Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Normalisasi Saluran Utama Parit Nayon Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan	CV. JASTINDO GRADANA	14/SPK/FSK-PL/DPUPP-SDA/PPK.4/APBD-P/XI/2025	178.747.935,36	2025
51	Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Normalisasi Saluran Utama (Perbatasan Desa) KP. Cikolek Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan	CV. BENA INSAN GEMILANG	15/SPK/FSK-PL/DPUPP-SDA/PPK.4/APBD-P/XI/2025	179.780.000,01	2025
52	Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Normalisasi Saluran Utama Julong Rekoh Desa Penaga Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan	CV. BENA INSAN GEMILANG	16/SPK/FSK-PL/DPUPP-SDA/PPK.4/APBD-P/XI/2025	179.483.739,69	2025
53	Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	Sub Keg Pembangunan, Pemanfaatan,Pelestarian & Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Prov - Dibayar Termin 100% Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Gedung Assesment Centre Prov Kepri	CV LA KONSULTANA	4.1/SP.DL/CK/PPK.4/APBD-P/XI/2025	99.892.452,00	2025
54	Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Sub Keg Pembangunan, Pemanfaatan,Pelestarian & Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Prov - Dibayar 100% Belanja Jasa Pengawasan Arsitektur Paket Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Dirkrimsus Polda Kepri Kota Batam (Lanjutan)	HAIYUNA ABADI CV	02/SP.PWS/DPUPP-CK/PPK.1/APBD/VII/2025	197.575.000,00	2025
55	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Pekerjaan Konsultansi Pengawasan Teknis Pemeliharaan / Renovasi Gedung Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kep. Riau Dia Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang	PT.MULTI FORMA RIAU KONSULTAN	03/SP.PWS/DPUPP-CK/PPK.1/APBD/VIII/2025	178.901.000,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
56	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Sub Kegiatan Pemeliharaan ,Perawatan & Pemeliharaan Berkala Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Prov - Dibayar Termin 100% Jasa Konsultansi Perencanaa Arsitektur & Pra Desain Arsitektural Pemeliharaan/Renovasi Gedung Perkantoran Prov Kepri di Pulau Dompak,Kota Tanjungpinang	CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN	06.01/SP.PRC/DPUPP-CK/PPK.5/APBD/VI/2025	29.327.226,75	2025
57	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	Belanja Pemeliharaan Tanah - Lapangan untuk Taman Median dan Pedestrian	CV. BENGKEL KREASINDO KEPRI	EP-01JVKJF681ZXF4H5YJHRNPCVPB	114.240.000,00	2025
58	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Review Desain Pembangunan Jembatan Batam - Bintan	CV. DIMIANO KONSULTAN	1.02/SP-KL/DED/PUPP-BM/APBD/VII/2025	178.603.662,00	2025
59	Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	Pengawasan Normalisasi Saluran Utama di Kecamatan Kundur Utara dan Kundur Barat Kabupaten Karimun	CV. TIGA PILAR ABADI	01/SPK/PWS-PL/DPUPP-SDA/PPK.2/APBDP/XI/2025	34.991.196,00	2025
60	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Sub Keg Pemeliharaan, Perawatan & Pemeliharaan Berkala Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Prov - Dibayar Termin 100% Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat-Gedung Kantor Pemeliharaan Renovasi Gedung Perkantoran Prov Kepri di Pulau Dompak,Kota Tanjungpinang	BENGKEL SPESIALIS KEPRI CV	9.2/SP-HS/DPUPP-CK/PPK.5/APBD/VIII/2025 Tanggal 25 Agustus 2025 add1 9.2/add-01/SP-HS/DPUPP-CK/PPK.5/APBD/X/2025 Tanggal 10 Oktober 2025 add 2 9.2/add-02/SP-HS/DPUPP-CK/PPK.5/APBD/XI/2025, tanggal 27 November 2025	825.059.387,23	2025
61	Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Normalisasi Sungai / Saluran Utama Sungai Raya RT 02 RW 006 Dusun IV Desa Sungai Ungar Utara Kec. Kundur Utara Kab. Karimun	CV.ADI JAYA PARAMITA	04/SPK/FSK-PL/DPUPP-SDA/PPK.2/APBD-P/XI/2025	179.988.500,22	2025
62	Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Normalisasi Sungai / Saluran Utama Parit Syukur RT 01 RW 03 Dusun III Desa Tanjung Berlian Barat kec. Kundur Utara Kab. Karimun	CV.ADI JAYA PARAMITA	02/SPK/FSK-PL/DPUPP-SDA/PPK.2/APBD-P/XI/2025	179.988.500,22	2025
63	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat KerjaBangunan Gedung Kantor	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat KerjaBangunan Gedung Kantor	CV. GENERASI LINTAS DIMENSI	027/23.04.017/SPK-PPK.1/PUPP.1/2025	98.285.292,53	2025
64	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Tenaga Jasa Outsoursing) Kekurangan Tagihan Bulan April s.d Oktober 2025	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PT. BAKRI KARYA SERVISUTAMA	027/19.03.35/SPKJTO/PPK/PUPP.1/2025	50.000.000,00	2025
65	Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Normalisasi Sungai / Saluran utama Parit Syukur RT 01 RW 05 Dusun III Desa Tanjung Berlian Barat kec. Kundur Utara Kab. Karimun	CV. NINDYA KARYA ARDANA	01/SPK/FSK-PL/DPUPP-SDA/PPK.2/APBD-P/XI/2025	179.994.050,22	2025
66	Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Normalisasi Sungai / Saluran utama Desa Sawang Selatan Kec. Kundur Barat Kab. Karimun	CV. NINDYA KARYA ARDANA	05/SPK/FSK-PL/DPUPP-SDA/PPK.2/APBD-P/XI/2025	179.994.429,84	2025
67	Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Normalisasi Sungai / Saluran Utama Dusun IV Dabit Sidomulyo RT 020 / RW 008 Desa Sawang Selatan Kec.Kundur Barat Kab. Karimun	CV. NINDYA KARYA ARDANA	03/SPK/FSK-PL/DPUPP-SDA/PPK.2/APBD-P/XI/2025	179.987.171,55	2025
68	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dibayar Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Pada Kegiatan Coaching Clinic (CC) Penjamin Kualitas Dokumen SKK Dan Pelaporan Implementasidokumen SKK Kabupaten / Kota Prov. Kepri Tahun 2025	PT. GANDASARI CKS HOTEL	027/10.52.01/SP-PPTK.4/PUPP.4/2025	25.300.000,00	2025
69	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Sub Keg Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian & Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Prov - Dibayar Termin 100% Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Pengawasan Teknis Paket Renovasi Ruang Samsat Batam Centre Lt.3 Graha Kepri, Kota Batam	PRIMA KREASI ARSINDO CONSULTANT CV	7/SPK/PGWS-PL/DPUPP-CK/PPK.1/APBD/X/2025	78.312.000,00	2025
70	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Semala, Kab Natuna	CV. GRACONA	1.01/SP-KWP/PWS/PUPP.3/PPK.14/VI/2025	49.157.993,00	2025
71	Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	Pengawasan Pembangunan Batu Miring Sungai Parit Jepun Jl. Muharal Kebun Pinang Rt.02 Rw.03 Kel. Gading Sari Kec. Kundur Kab. Karimun Kundur Karimun	CV. BERGIN DWI DIMENSI	03/SPK/PWS-PL/DPUPP-SDA/PPK.2/APBD-P/XI/2025	15.187.708,40	2025
72	Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional Dan Kawasan Strategis Lainnya	5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Dibayar Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Pekerjaan Pengecetan Dinding Penahan Tanah Di Kawasan Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang	STANDARD SUKSES ABADI CV	003/SPK/JK/PL/PUPP-UPTDPPI/PPK.33/APBDP/XII/2025	99.805.532,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
73	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Pakaian Dinas Harian (Full Logo Bordir))	CV. CAHAYA	EP-01KCG6VM6H1HYQ9ASRAEDQXFZA	17.953.992,00	2025
74	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Sub Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Dibayar Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Tenaga Jasa Outsourcing) Bulan Nopember s/d Desember 2025	PT. BAKRI KARYA SERVISUTAMA	027/19.03.55/SPKJTO/PPK/PUPP.1/2025	79.186.690,00	2025
75	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan - Dibayar Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Desember 2025	PT BAKRI KARYA SERVISUTAMA	027/107/SP-PPK.36/PUPP.8/2025	39.400.097,00	2025
76	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Dibayar Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Tenaga Outsorcing)	PT. BAKRI KARYA SERVISUTAMA	027/10.03.32/SP-PPK/PUPP.3/2025	32.236.443,00	2025
JUMLAH								**15.830.567.150,20**	

B. UTANG BELANJA HIBAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	Sub Keg Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian & Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Prov - Dibayar Termin 100% Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat Paket Pembangunan RS Angkatan Darat Bengkong Kota Batam (Lanjutan)	DWI SAHABAT INDONESI	8.4/ADD-1/SP-HS/DPUPP-CK/PPK.2/APBD/IX/2025	1.405.115.789,40	2025
2	Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	Sub Keg Pembangunan, Pemanfaatan,Pelestarian & Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Prov - Dibayar 100% Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat Pekerjaan Pembangunan Ruang Baca di Kejati Kota Tanjungpinang	VENINDO PRIMA CV	04.9/SP.PRC-PL/DPUPP-CK/PPK.2/APBD-P/XI/2025	54.889.500,00	2025
3	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	Sub Keg Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian & Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Prov - Dibayar Termijn 100% Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat Paket Pembangunan Gedung Dirkrimsus Polda Kepri,Kota Batam (Lanjutan)	PT NURFITA KARYA MANDIRI	8.3/SP-HS/DPUPP-CK/PPK.2/APBD/VII/2025, tanggal 10 Juli 2025 add 1 8.3/ADD.01/SP.HS/DPUPP-CK/PPK.2/APBD/X/2025 , tanggal 27 Oktober 2025 add2 8.3/ADD-02/SP.HS/DPUPP-CK/PPK.2/APBD/XI/2025 , tanggal 05 November 2025	478.957.397,33	2025
4	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	Sub Keg Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian & Pembongkran Bangunan Gdng Untuk Kepentingan Strategis Daerah Prov - Dibayar 100% Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat Paket Pembangunan Gedung Persatuan Istri Tentara (Persit) di KOREM 033 WIRA PRATAMA,Tanjungpinang	VENDOOR MEBELIA INDO	8.5/SP-HS/DPUPP-CK/PPK.2/APBD/VIII/2025, tanggal 5 Agustus 2025 add 1 8.5/ADD-1/SP-HS/DPUPP-CK/PPK.2/APBD/IX/2025 , tanggal 22 September 2025	1.033.334.620,00	2025
							JUMLAH	**2.972.297.306,73**	

C. UTANG BELANJA MODAL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rekonstruksi Jalan	5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	Peningkatan Jalan Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik, Kab. Lingga	PT. INSANI ABADI	ADD/01.14.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.9/XI/	1.073.336.230,00	2025
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.2.04.04.01.0003	Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi	Sub Keg Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) LINTAS KAB/KOTA - Dibayar Termijn 100% Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi Paket Pengembangan Jaringan Perpipaan Di Kawasan LANUDAL Tanjungpinang	EKA BALINGGA PT	09.2/SP.FSK/DPUPP-CK/PPK.6/APBD/VII/20	940.926.446,80	2025
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Belanja Modal Personal Computer (Belanja Modal Laptop Dan Komputer)	CV. UNISINDO	EP-01KAG2PY3MZBQ49PEXDVCEFY22	74.250.001,00	2025
4	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan	5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan Semala, Kab Natuna	PT. MEKAR ABADI SUKSES	2.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.14/VI/2025	3.228.307.256,31	2025
5	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rekonstruksi Jalan	5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang	PT. BENGKEL KREATIF UTAMA	ADD.02.12.01/SP-HS/FSK/PUPP.3/PPK.9/XII	662.514.630,00	2025
6	Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Pembangunan Batu Miring Sungai Desa Ceruk Kec. Bunguran Timur Laut Kab. Natuna	CV. RAJA PUTRA BERTUAH	11/SPK/FSK-PL/DPUPP-SDA/PPK.3/APBD-P	199.411.380,56	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	4	5	*6*	*7*	8	*9*	*10*
7	Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Pembangunan Batu Miring Sungai Silas, belakang Kantor Desa Kelanga, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kab. Natuna	CV. ROYAL MARLYN BONANZA	10/SPK/FSK-PL/DPUPP-SDA/PPK.3/APBD-P	174.587.968,33	2025
8	Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Pembangunan Tembok Penahan Tebing/Pemecah Ombak Pentai Desa Pengadah. Kec. Bunguran Timur Laut Kab. Natuna	CV. PIJAR MANDIRI	09/SPK/FSK-PL/DPUPP-SDA/PPK.3/APBD-P	209.079.131,53	2025
9	Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Pembangunan Batu Miring Sungai Parit Jepun Jl. Muharal Kebun Pinang Rt.02 Rw.03 Kel. Gading Sari Kec. Kundur Kab. Karimun	CV. GAUTAMA ALMAHYRA	07/SPK/FSK-PL/DPUPP-SDA/PPK.2/APBD-P	259.690.819,43	2025
									2025
							JUMLAH	**6.822.103.863,96**	

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	577.377.946,41
2	Penambahan Utang 2025	30.759.065.791,00
	Total Utang Belanja	**31.336.443.737,41**

A. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	-	Kegiatan Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab/Kota	-	-	Kegiatan Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab/Kota - Dibayarkan Termin 100%, Pengawasan Teknis Natuna I	CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN	-	9.100.000,00	2018
2	-	Kegiatan Penyediaan Penyelenggaraan Psu Permukiman Kawasan Perkotaan	-	-	Kegiatan Penyediaan Penyelenggaraan Psu Permukiman Kawasan Perkotaan - Dibayarkan Termin 100%, Pengawasan Teknis Pembangunan Surau As Salam Di Sedanau Kec. Bunguran Barat Kab. Natuna	PT. INTERDIMENSI KONSULTAN	-	41.600.000,00	2018
3	-	Semenisasi Jalan Gang Tuk Tayib/Gang Indra Rt 002 Rw 003 Desa Kelarik Kecamatan Bunguran Utara	-	-	Kegiatan Semenisasi Jalan Gang Tuk Tayib/Gang Indra Rt 002 Rw 003 Desa Kelarik Kecamatan Bunguran Utara - Dibayarkan Termin 100%, Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Gang Tuk Tayib/Gang Indra Rt 002 Rw 003 Desa Kelarik Kecamatan Bunguran	CV. MITRA BINTA KONSULTAN	-	11.900.000,00	2018
4	-	Semenisasi Jalan Gang Haji Wan Sudarman Desa Sekalong Kecamatan Bunguran Timur Laut	-	-	Kegiatan Semenisasi Jalan Gang Haji Wan Sudarman Desa Sekalong Kecamatan Bunguran Timur Laut - Dibayarkan Termin 100%, Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Haji Wan Sudarman Rt 007 Rw 004 Desa Sekalong Kecamatan Bunguran Timur Laut	CV. MITRA BINTA KONSULTAN	-	11.900.000,00	2018
5	-	Semenisasi Jalan Hr. Sobrantas Gg. Saat Desa Bandarsyah Kecamatan Bengurang Timur Kabupaten Natuna	-	-	Kegiatan Semenisasi Jalan Hr. Sobrantas Gg. Saat Desa Bandarsyah Kecamatan Bengurang Timur Kabupaten Natuna - Dibayarkan Termin 100%, Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Hr. Sobrantas Gg. Saat Desa Bandarsyah Kecamatan Benguran Timur Kabu	CV. MITRA BINTA KONSULTAN	-	11.900.000,00	2018
6	-	Pembangunan Gedung Workshop Karang Taruna Rt01/ Rw 01 Kelurahan Kijang Kota	-	-	Kegiatan Pembangunan Gedung Workshop Karang Taruna Rt01/ Rw 01 Kelurahan Kijang Kota - Dibayarkan Termijn 100%, Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Gunung Kijang Kelurahan Kawal Jalan Wisata Bahari Kp Bansun Rt.003 Rw.005	PT. MARCELINO SUKSES MANDIRY	-	9.960.000,00	2018
7	-	Pembangunan Gedung Workshop Karang Taruna Rt01/ Rw 01 Kelurahan Kijang Kota	-	-	Pembangunan Gedung Workshop Karang Taruna Rt01/ Rw 01 Kelurahan Kijang Kota - Dibayarkan Angsuran I, Ii, Dan Iii (100%) Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Gunung Kijang Kelurahan Kawal Jalan Wisata Bahari Kp Bansun Rt.003	PT. ASTERIX ANUGRAH	-	10.850.000,00	2018
8	-	Semenisasi Dekat Perumahan Villa Bintan Pratama Batu 9 Arah Dompak	-	-	Kegiatan Semenisasi Dekat Perumahan Villa Bintan Pratama Batu 9 Arah Dompak - Dibayarkan Termijn 100%,Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Perum Citra Pratiwi Rt.3 Rw. Xi Kel. Batu Ix Kec. Tpi Timur Km.14 Arah Kijang	PT. ASTERIX ANUGERAH	-	11.968.000,00	2018

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	4	5	*6*	*7*	8	*9*	*10*
9	-	Penyediaan Prasarana Sarana Perkantoran Pemerintahan (Tunda Bayar 2017)	-	-	Kekurangan Bayar Utang Tahun 2017 Atas Pekerjaan Pengawasan Teknis Penataan Dan Perbaikan Masjid Raya Nur Ilahi Dompak	PT. BENTAN SONDONG	-	1.407.500,00	2018
10	-	Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Batam (Tunda Bayar 2017)	-	-	Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Permukiman Wilayah Batam 7	CV. KAYONNA ABADI BERSAUDARA	-	14.800.000,00	2018
11	-	Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Batam (Tunda Bayar 2017)	-	-	Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Permukiman Wilayah Batam 8	CV. KAYONNA ABADI BERSAUDARA	-	14.800.000,00	2018
12	-	Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Batam (Tunda Bayar 2017)	-	-	Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Permukiman Wilayah Batam 9	CV. KAYONNA ABADI BERSAUDARA	-	14.800.000,00	2018
13	-	Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Batam (Tunda Bayar 2017)	-	-	Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Permukiman Wilayah Batam 10	CV. KAYONNA ABADI BERSAUDARA	-	14.800.000,00	2018
14	-	Revitalisasi Gereja	-	-	Kegiatan Revitalisasi Gereja - Dibayar 95% Pada Paket Pekerjaan Revitalisasi Gereja Bnkp Kavling Seroja	CV. MORIA PRIMA JAYA	-	199,99	2018
15	-	Kegiatan Penyediaan Penyelenggaraan Psu Permukiman Kawasan Perkotaan	-	-	Kegiatan Penyediaan Penyelenggaraan Psu Permukiman Kawasan Perkotaan - Dibayar 90% Pada Paket Pekerjaan Peningkatan / Pembangunan Masjid Darul Jannah Kec. Karimun Di Karimun	CV. AIR MADU	-	61.996.507,27	2018
16	-	Kegiatan Penyediaan Prasarana Sarana Perkantoran Pemerintahan Lainnya	-	-	Kegiatan Penyediaan Prasarana Sarana Perkantoran Pemerintahan Lainnya - Dibayar Retensi 5% Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Joglo @Lapangan Tennis Polresta Barelang Kota Batam	CV. CITRA SUVI PERSADA	-	0,40	2018
17	-	Kegiatan Penyediaan Penyelenggaraan Psu Permukiman Kawasan Perkotaan	-	-	Peningkatan Mesjid Baiturahman Kabupaten Karimun (Lanjutan)	PT. TIGA NAGA MAS	-	253.786.275,00	2018
18	-	Kegiatan Penyediaan Prasarana Sarana Perkantoran Pemerintahan Lainnya	-	-	Pembangunan Tambahan Barak Spn Polda Kepri Di Tanjung Batu	PT. ATOM	-	10.775,75	2018

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
19	-	Penataan Dan Peningkatankualitas Kawasan Strategis Provinsi Permukiman Khusus Pulau Dompak (Tunda Bayartahun 2017)	-	-	Kekurangan Pembayaran Atas Utang Tahun 2017 Pekerjaan Pembangunan Surau Di Kawasan Perumahan Tanjung Siambang Pulau Dompak	CV. BALQIS JAYA	-	3.777,75	2018
20	-	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Perkotaan Di Kota Batam	-	-	Revitalisasi Rumah Ibadah Gpi Batu Aji Baru Kec Sagulung	CV. TAPINDO JAYA	-	6.996.175,00	2020
21	-	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Perkotaan Di Kota Batam	-	-	Pengawasan Teknis Pembangunan Mesjid At-Tajdid Tiban Koprasi	PT. ASTAKONA CITRA GRAFINDO	-	19.650.000,00	2020
22	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan Psu Permukiman	Hibah Bangunan Rusun Keluarga 4 Lantai Type 46 Di Mako Satbrimob Polda Kepri	-	-	Dibayarkan 95% Pada Paket Pekerjaan Hibah Bangunan Rusun Keluarga 4 Lantai Type 46 Di Mako Satbrimob Polda Kepri	CV. SINAR AGUNG MANDIRI	-	919.922,75	2022
23	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Semenisasi Perum Graha Senggarang Permai RW 009Kec. Tanjung pinang Timur	CV. NUSA DUA CONSULTANT	1322/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD/2024	17.936.000,00	2024
24	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan PSU Di Perumahan Tiara Mantang RW 005 Sagulung Kota	CV. SUBUR MAKMUR SENTOSA	281/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	95.703.000,00	2025
25	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Pondok Pesantren Al-Amin MCD Bengkong Batam	CV. PUTRA SAPRINDO	307/04.05/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	399.627.000,00	2025
26	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Santri Pondok Pesantren Sirojul Amal Alfatah Kelurahan Sei Pelungut Kecamatan Sagulung Batam	CV. PUTRA SAPRINDO	310/04.05/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	189.671.000,00	2025
27	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Pondok Pesantren Alfalah Assafiiyah Nurul Jadid Bengkong Permai Batam	CV. PUTRA SAPRINDO	306/04.05/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	399.655.000,00	2025
28	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lingga - Dabo Singkep - Kabupaten Lingga	CV. GADJAH MINE PERKASA	72/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	399.744.000,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
29	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Uang Muka 30% Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran (STIQ) Kepulauan Riau - Kota Batam	CV. LALUNA ARTHA KENCANA	91/04.05/SP/DPKP-PSU/APBD/IX/2025	243.388.110,00	2025
30	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Pandawa Dusun 3 Kp. Jawa Desa Tlk. Radang Kundur Utara (Pengerasan) - Kab. Karimun	CV. ARMACO KONSULTAN	422/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	20.725.000,00	2025
31	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Permukiman Kabupaten Karimun 5	CV. ARMACO KONSULTAN	432/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	45.263.000,00	2025
32	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Permukiman Kabupaten Karimun 4	CV. SKALA MULTI REKAYASA KONSULTAN	431/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	51.619.000,00	2025
33	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Permukiman Kabupaten Karimun 6	CV. SKALA MULTI REKAYASA KONSULTAN	427/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	58.168.000,00	2025
34	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan PSU Di Pemukiman Perumahan Griya Sagulung Permai Rt 004	CV. INSAN CIPTA PERKASA	280/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	53.789.000,00	2025
35	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan PSU Di Perumahan Griya Sagulung Permai RT. 03 Rw. 01	CV. BERKARYA CIPTA MANDIRI	270/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	62.756.000,00	2025
36	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan PSU Di Perumahan Bambu Kuning RW 001 , Bukit Tempayan	CV. SUBUR MAKMUR SENTOSA	277/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	117.264.000,00	2025
37	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Permukiman Kabupaten Karimun 7	CV. SKALA MULTI REKAYASA KONSULTAN	532/04.05/SPK/PERC-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	41.760.000,00	2025
38	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Permukiman Kota Batam 25	PT. STUDIO EMPAT BELAS	466/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD/VIII/2025	51.941.300,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
39	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Permukiman Kota Batam 21	PT. STUDIO EMPAT BELAS	472/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD/VIII/2025	44.956.100,00	2025
40	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Permukiman Kota Batam 26	PT. STUDIO EMPAT BELAS	467/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD/VIII/2025	58.422.600,00	2025
41	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan PSU Di Kav. Flamboyan Rt 001/14 Sei Pelunggut	CV. INSAN CIPTA PERKASA	273/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	116.232.000,00	2025
42	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Miftahul Fallah Kota Tanjungpinang	CV. JASTINDO GRADANA	359/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	399.374.000,00	2025
43	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Drainase U40 Perum. Citra Renggali Cluster Dahlia, RT. 001, RW. 025, Kel. Tanjung Riau, Kec. Sekupang	CV. AMORE SEJAHTERA	205/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	99.596.000,00	2025
44	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan TPA Kavling Lama, RW 10, Kel. Sagulung Kota, Kec. Sagulung	CV. NAKITA BERSATU	208/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	129.861.000,00	2025
45	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan TPA Perum. Taman Pesona Indah Thp II, RT. 06, RW. 09, Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batuaji	CV. NAKITA BERSATU	209/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	99.310.000,00	2025
46	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Drainase U40 Perum. Marina Green RT 004 RW 018, Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji	CV. AMORE SEJAHTERA	206/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	99.830.000,00	2025
47	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Lampu Jalan Perum. Griya Batu Aji Asri Thp I, II, III RT 001 RW 016, Kel. Sei Langkai, Kec. Sagulung	PT. ASAHAN MEGA PLAN	207/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	129.668.000,00	2025
48	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan PSU DI KAV LAMA RW 011 SAGULUNG KOTA	CV. INSAN CIPTA PERKASA	271/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	117.908.000,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
49	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan PSU DI PERUMAHAN TIARA MANTANG RT 005 RW 005 SAGULUNG KOTA	PT. GARYA INDO CEMERLANG	279/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	57.848.000,00	2025
50	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pagar Fasum Perum Garaha Mas RT 003 RW 013, Kel. Tanjung Riau, Kec. Sekupang	CV. NAKITA BERSATU	132/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	99.344.000,00	2025
51	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Permukiman Kota Batam 27	CV. BINTANG PRATAMA ARSINDO CONSULTANT	534/04.05/SPK/PERC-PL/DPKP-PSU/APBD/V/2025	48.873.300,00	2025
52	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Semenisasi Jalan Depan SMP N 25 RT 08 RW 03 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang	CV. BINTANG PRATAMA ARSINDO CONSULTANT	548/04.05/SPK/PERC-PL/DPKP-PSU/APBD/V/2025	34.865.100,00	2025
53	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Permukiman Kabupaten Natuna 8	CV. ELEMEN GEOMETRI KONSULTAN	514/04.05/SPK/PERC-PL/DPKP-PSU/APBD/VI/2026	38.942.100,00	2025
54	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Permukiman Kabupaten Natuna 7	CV. ELEMEN GEOMETRI KONSULTAN	512/04.05/SPK/PERC-PL/DPKP-PSU/APBD/VI/2025	53.951.500,00	2025
55	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan penataan lingkungan RW 1 & 4 pulau Kasu	CV. DUA PUTRA GEMILANG OPTIMA	635/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	845.165.402,00	2025
56	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan PERBAIKAN JALAN RT. 02 RW.02 KEL. PATAM LESTARI KECAMATAN SEKUPANG	CV. UDIN JAYA	631/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P /XI/2025	84.730.000,00	2025
57	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Semenisasi Jalan Kav. Seraya Kel Sambau Kec Nongsa	CV. UDIN JAYA	173/04.05/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	139.730.000,00	2025
58	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Penyediaan Psu Yayasan Hakikat Shalihi Batam Rt 06 Rw 07 kel Mangsang Kec Sei Beduk	CV. AMORE SEJAHTERA	184/04.05/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	139.484.000,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
59	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengaspalan Perum. Taman Kota Mas, RT.004, RW. 009, Kel.Tanjung Uma, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam. Batam	CV. MINIKO SEJAHTERA	610/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P /XI/2025	179.784.000,00	2025
60	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Penyediaan PSU - Lanjutan Semenisasi Jalan Desa Penuba Arah Sembuang, Dusun Sembuang Kec. Selayar - Kab. Lingga	CV. GRAHADITAMA CONSULTAN	348/04.05/SPK/PERC-PL/DPKP-PSU/APBD/VI/2025	67.377.000,00	2025
61	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Semenisasi Jalan Menuju Kp. Ulu Selindan Dusun Ii Desa Kuala Raya Kec. Singkep Barat	CV. GRAHADITAMA CONSULTAN	405/04.05/SPK/PERC-PL/DPKP-PSU/APBD/VI/2025	44.733.000,00	2025
62	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Pelantar Rt.03 Rw.03 Desa Tanjung Pala Kec. Pulau Laut Natuna	CV. PIJAR MANDIRI	554/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/XI/2025	339.822.900,00	2025
63	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengaspalan Perum. Citra Indah. Rt.02 / Rw.06, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam. Batam	CV. MINIKO SEJAHTERA	608/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P /XI/2025	179.860.000,00	2025
64	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Pelantar Beton Dari Pelantar Padil Menuju Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Sedanau Kecamatan	CV. ANAK TIMO MANDIRI	555/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/XI/2025	254.693.400,00	2025
65	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Semenisasi Perum. Permata Baloi RT 03 / RW. 08 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja	CV. MINIKO SEJAHTERA	628/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P /XI/2025	349.802.000,00	2025
66	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Lanjutan Semenisasi Beton Bertulang Jalan Sudirman Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna	CV. KARYA ABADI	557/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/XI/2025	254.802.800,00	2025
67	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Batu Miring Kiri Kanan Jalan Sei Kalong Depan Rumah Haji Bali, Desa Kelange Kecamatan Bunguran Timur Laut, Natuna	CV. ROYAL MARLYN BONANZA	558/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/XI/2025	254.778.000,00	2025
68	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Permukiman Kota Batam 33	PT. EMBUN SHOFIYA GROUP	547/04.05/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD-P/X/2025	20.361.000,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
69	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Permukiman Kota Batam 32	CV. PRIMA KREASI ARSINDO CONSULTANT	545/04.05/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD-P/X/2025	39.284.000,00	2025
70	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Semenisasi Jalan di Pulau Kasu	CV. SAYID UTAMA JAYA	551/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	49.894.000,00	2025
71	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Penataan Lingkungan RW 1 & 4 Pulau Kasu	CV. SULTAN CONSULTANT	553/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	49.894.000,00	2025
72	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepulu) Ha Sampai Dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepulu) Ha Sampai Dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pekerjaan Pengawasan Pembangunan sistem pengelolaan air limbah Domestik skala Individual di Pemping, Batam	CV. TRANS KARISMA	12/04.03/SPK/PWS-PL/DPKP-PERKIM/APBD/VIII/2025	39.813.000,00	2025
73	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepulu) Ha Sampai Dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepulu) Ha Sampai Dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Perbaikan RTLH di Kelurahan Temoyong, Kec. Bulang, Kota Batam	CV. TRANS KARISMA	16/04.03/SPK/PWS-PL/DPKP-PERKIM/APBD/VIII/2025	49.834.000,00	2025
74	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Semenisasi Jalan Kampung Kolam Jl. Kampung Kolam Rt001 Rw011 Kelurahan Seijang Kecamatan Bukit Bestari, Provinsi Kepulauanriau Tanjungpinang	CV. EMPAT BERNAMA	576/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	129.863.000,00	2025
75	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Permohonan Bantuan Semenisasi Jalan Jalan Senggarang Darat GG Karet RT003 RW004, Kelurahan Senggarang, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang	PT. TAQIYA SUMBER BAHAGIA	573/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	159.811.000,00	2025
76	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Perbaikan Drainase Komplek Sakura Permai RT003 RW004, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam	CV. ARAYA KONSTRUKSI ANDA	630/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P /XI/2025	234.855.000,00	2025
77	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Permohonan Bantuan Semenisasi Jalan Jalan Tanjung Sebauk RT001 RW006 Kelurahan Senggarang, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang	PT. TAQIYA SUMBER BAHAGIA	574/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	159.828.000,00	2025
78	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Semenisasi Perumahan Puri Sri Gading RT 02 RW 03 Kelurahan Dompak, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang	CV. ANAK TAMIANG	581/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	179.898.000,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
79	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Semenisasi Jalan Depan Smp N 25 Rt 08 Rw 03 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang	CV. SINAMAN KITA BERSAUDARA	633/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/XI/2025	399.275.300,00	2025
80	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Beton Bertulang Jalan Kartini Rt.01/Rw.02 Dusun 1 Rahayu Jaya Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau Batubi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau	CV. TELUK SANGKI BAHARI	556/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/XI/2025	179.780.500,00	2025
81	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Semenisasi dan pagar harmonika lapangan volly perum. cluster grand jaelynne. Kel. Sagulung kota. kec. sagulung. Batam	CV. SINAMAN KITA BERSAUDARA	629/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P /XI/2025	274.347.000,00	2025
82	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Peningkatan Fasum Perumahan Graha Namarina Rw 0021 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam Batam	CV. TRI KARIYA UTAMA	619/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P /XI/2025	154.904.000,00	2025
83	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Semenisasi jalan Komplek Wijaya RT 002 RW 001 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang Kota Batam	CV. BATAM JAYA MAKMUR MANDIRI	618/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P /XI/2025	154.683.000,00	2025
84	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Tembok penahan tanah Perum Galaxi Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam	CV. TRI KARIYA UTAMA	617/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P /XI/2025	109.729.000,00	2025
85	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Aula Ponpes Nurul Iman Kasu Jl. Tanjung Permai RT.013/RW.004 Kel. Kasu Kec. Belakang Padang - Batam	PT. EMBUN SHOFIYA GROUP	449/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD/VII/2025	74.922.000,00	2025
86	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Prasarana Dan Utilitas Umum Di Kec. Tanjungpinang Timur	PT. BINTAN MUDA SUKSES	583/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	245.354.000,00	2025
87	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Semenisasi Jalan Bengkong Indah Swadebi RT 001 RW 002 Sadai, Kec Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau	CV. PUTRA SAPRINDO	305/04.05/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	179.676.000,00	2025
88	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Olah Raga Posek Kec. Kepulauan Posek Posek Kec Kepulauan Posek	CV. SETIA JAYA	75/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	179.783.000,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
89	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Revitalisasi Rumah Ibadah Desa Tebing Kecamatan Lingga Timur	CV. BUIH SAKTI	344/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	399.691.000,00	2025
90	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Pelantar Desa Sungai Pinang Kec. Lingga Timur	CV. GADJAH MINE PERKASA	330/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	179.815.000,00	2025
91	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Lanjutan Semenisasi Jalan Desa Teluk Kecamatan Lingga Timur	CV. ROLAND	343/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	244.816.000,00	2025
92	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Terbuka Untuk PAUD, Kp. Teluk Nipah PulauMas, Kab.Lingga	CV. BUMI BANGUNAN	73/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	129.825.000,00	2025
93	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan PSU di Kota Batam Pulau Sekanak ,Kel. Sekanak Raya, Kec. Belakang Padang, Kota Batam	CV. MEGAT BERTUAH	199/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	169.177.000,00	2025
94	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Penyediaan PSU - Lanjutan Semenisasi Jalan Desa Penuba Arah Sembuang, Dusun Sembuang Kec. Selayar - Kab. Lingga	CV. KURNIA SINAMBUNG KONSULTAN	437/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD/2026	57.372.000,00	2025
95	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Semenisasi Jalan Menuju Kp. Ulu Selindan Dusun Ii Desa Kuala Raya Kec. Singkep Barat	CV. KURNIA SINAMBUNG KONSULTAN	495/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	34.908.000,00	2025
96	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Penyediaan PSU - Lanjutan Semenisasi Desa Suak Buaya Kec. Posek - Kab. Lingga	CV. KURNIA SINAMBUNG KONSULTAN	436/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	20.912.000,00	2025
97	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan PENGAWASAN TEKNIS REVITALISASI RUMAH IBADAH DESA TEBING KECAMATAN LINGGA TIMUR	CV. EMBUN CONSULTANT	497/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	34.886.000,00	2025
98	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Lanjutan Semenisasi Jalan Desa Teluk Kecamatan Lingga Timur	CV. BERKAT KARYA KONSULTAN	496/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	20.856.000,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
99	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pembangunan batu miring perumahan golden park rt.05 rw.08 kel. sambau kec. nongsa, Provinsi Kepulauan Riau	CV. CIPTA KARYA ANDA	266/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	134.830.000,00	2025
100	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Paving Block Kp. Krajan Rt.02/Rw.03 Kel. Kota Baru Kec. Teluk Sebong	CV. CHENOA VIOLA MANDIRI	582/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	179.910.000,00	2025
101	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Semenisasi Jalan RT. 03 RW 30 Kecamatan Batam Kota Kelurahan Belian Perumahan Bukit Palem Permai	CV. CIPTA KARYA ANDA	612/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/XI/2025	179.687.700,00	2025
102	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pekerjaan Semenisasi Jalan Perum Victoria RT 02 RW 016 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam	CV. BATAM JAYA MAKMUR MANDIRI	623/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P /XI/2025	179.769.000,00	2025
103	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Taman Desa Jalan Karya Warga Rt 05 Rw 03 Dusun Ii Semalir Desa Bukit Harapan	CV. BUIH SAKTI	338/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	179.776.000,00	2025
104	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Penyediaan PSU - Lanjutan Semenisasi Desa Suak Buaya Kec. Posek - Kab. Lingga	CV. ROLAND	70/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	244.800.000,00	2025
105	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Penataan PSU Fasum Kapling Tiban Madani, Tiban 1 Rw 04 Kel Patam Lestari, Sekupang	CV. PRATAMA GEMILANG	351/04.05/SP/DPKP-PSU/APBD/IX/2025	631.691.697,09	2025
106	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Penataan PSU Fasum Perumahan Tiban Palem Rw 08 Kel Tiban Baru, Sekupang	CV. ANUGERAH CIPTA MANDIRI	352/04.05/FSK/DPKP-PSU/APBD/2025	506.524.268,00	2025
107	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Gedung Serbaguna Rw 17 Griya Batu Aji Asri	CV. BERKARYA CIPTA MANDIRI	627/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P /XI/2025	89.790.000,00	2025
108	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan PSU Di Perumahan Permata Rhabayu Rt 03/18 Tembesi	CV. BERKARYA CIPTA MANDIRI	620/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P /XI/2025	179.665.000,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
109	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Drainase Griya Batu Aji RT 04 RW 18	CV. SUBUR MAKMUR SENTOSA	626/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P /XI/2025	179.791.000,00	2025
110	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan PSU Di Perumahan Bukit Sakinah Rw 27 Kel. Buliang Batu Aji (Drainase)	CV. SUBUR MAKMUR SENTOSA	621/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P /XI/2025	139.848.000,00	2025
111	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan peningkatan sarana dan prasarana Perum Griya Mawadah Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang, Provinsi Kepulauan Riau	CV. ANAK SULTAN BINTAN	570/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	179.811.000,00	2025
112	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Peningkatan sarana dan prasarana Masjid Nurul Iman Kampung Poyotomo Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan	CV. ANAK SULTAN BINTAN	569/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	179.848.000,00	2025
113	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Pekerjaan Revitalisasi Drainase Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Bintan	CV. NIRWANA JAYA	571/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	179.789.000,00	2025
114	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Semenisasi Perumahan Jl. Indunsuri Gg. Wonorejo, Kab.Bintan	CV. KARYA SINAR ABADI	567/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	179.813.000,00	2025
115	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi Mushollah Baitul Ra'uf, Desa Toapaya Utara, Kab.Bintan	CV. ANAK TAMIANG	562/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	89.826.000,00	2025
116	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Semenisasi Rt.14 Rw.5 Kp. Bumi Indah, Gg.Salak Agro, Kab.Bintan Bintan	CV. GENERASI LINTAS DIMENSI	563/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	179.773.000,00	2025
117	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Permukiman Kabupaten Lingga 3	CV. BERKAT KARYA KONSULTAN	439/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	51.822.000,00	2025
118	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan penyediaan psu di perum pesona bukit laguna thp2 RT 05 RW 16 Kel Tanjung Piayu kec Seibeduk Batam	CV. UDIN JAYA	625/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P /XI/2025	129.784.000,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
119	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Penyediaan Psu Pemukiman Rw 05 Kel Kabil Kec Nongsa Batam	PT. ASAHAN MEGA PLAN	606/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P /XI/2025	179.883.000,00	2025
120	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Semenisasi Jalan Kav. Seraya Indah Kel Sambau Kec Nongsa Batam	CV. UDIN JAYA	607/04.05/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/XI/2025	179.737.000,00	2025
121	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pekerjaan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman Kota Tanjungpinang 8	CV. BERKAT KARYA KONSULTAN	527/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	34.358.000,00	2025
122	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan PSU RT 01/RW 08 Kampung Karang Rejo Kota Tanjungpinang	CV. BERKAT KARYA KONSULTAN	531/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	23.918.000,00	2025
123	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pekerjaan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman Kota Tanjungpinang 7	CV. BERKAT KARYA KONSULTAN	525/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	25.843.000,00	2025
124	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Revitalisasi Pujasera Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan (Lanjutan)	CV. MEGASINDO JAYA	566/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	299.738.000,00	2025
125	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Semenisasi Jalan Depan Smp N 25 RT 08 RW 03 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang	CV. KEMBANG JALA	549/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD-P/XI/2025	24.857.300,00	2025
126	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Umum Gereja Katolik Desa Berakit, Kabupaten Bintan	CV. ANAK TAMIANG	564/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	129.798.000,00	2025
127	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Permukiman Kota Batam 9	CV. KARANG NYIUR	463/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD/VII/2025	41.979.000,00	2025
128	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Permukiman Kota Batam 10	CV. KARANG NYIUR	464/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD/VII/2025	32.493.000,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
129	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Permukiman Kota Batam 22	CV. KARANG NYIUR	481/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD/VIII/2025	30.978.000,00	2025
130	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepulu) Ha Sampai Dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepulu) Ha Sampai Dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pekerjaan Pengawasan Teknis Perbaikan RTLH Ddi Kawasan Kumuh di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	CV. ziq zaq consultant	03/04.03/SPK/PWS-PL/DPKP-PERKIM/APBD/IX/2025	59.800.000,00	2025
131	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Permukiman Kabupaten Lingga 1	CV. BERKAT KARYA KONSULTAN	493/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	38.871.000,00	2025
132	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Permukiman Kabupaten Lingga 2	CV. EMBUN CONSULTANT	494/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	38.848.000,00	2025
133	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Permukiman Kota Batam 27	CV. KEMBANG JALA	535/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD-P/XI/2025	45.370.100,00	2025
134	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Tpq Yayasan Al-Hidayah Perumahan Pgri Kel. Sungai Binti, Kec. Sagulung, Kota Batam	CV. TRANS KHARISMA	501/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	39.849.000,00	2025
135	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Prasarana Utulitas umum di kota Batam	PT. JESSICA MANDIRI SEJAHTERA	632/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P /XI/2025	179.882.000,00	2025
136	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Pelantar Beton Semente Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat - Kab. Natuna	CV. PIJAR MANDIRI	97/04.05/SP-HS/DPKP-PSU/APBD/2025	534.344.083,23	2025
137	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Semenisasi Kawasan Baru Kuburan Tiong Hoa Kampung Bukit Jl Bina Bangsa Rt 002 Rw 001 Meral Kota, Kec. Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau	CV. ZOEY SUKSES MANDIRI	37/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	179.955.000,00	2025
138	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jl. Perumahan Griya Sungai Raya Rw 001 Kec. Meral Kelurahan Sungai Raya Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau	CV. ZOEY SUKSES MANDIRI	28/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	179.974.000,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
139	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Semenisasi Jalan Kampung Baru Rt 006 Rw 003 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.	CV. ZOEY SUKSES MANDIRI	22/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	144.912.000,00	2025
140	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Permukiman Kota Batam 24	CV. JAYA NUSANTARA ENGINEEREING CONSULTANT	483/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD/VIII/2025	64.388.000,00	2025
141	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	5.1.02.02.008.000 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan DED Penataan Taman Kota Kijang	CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN	636/04.05/SP/DED/DPKP-PSU/APBDP/2025	434.276.622,00	2025
142	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gapura di Kota Batam Perumahan Cipta Asri Blok Apricot, Kel. Tembesi, Kec. Sagulung. Kita Batam	CV. AFANNUM JAYA	624/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P /XI/2025	179.771.000,00	2025
143	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tpq Pulau Bertam Kec. Belakang Padang	CV. BERKAH TUAH KEPRI	347/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	179.849.000,00	2025
144	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jl Usman Harun Rt.001 /Rw.001 Tanjung Batu Kota, Kec Kundur Kabupaten Karimun Kepulauan Riau (Area Ke Rumah Duka Umat Buddha)	CV. MULNUR CITRA BERSAMA	594/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	179.853.000,00	2025
145	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Semenisasi Jalan Vihara Arya Dharma Sanglang Desa Tanjung Berlian Barat Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun	CV. MULNUR CITRA BERSAMA	591/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	179.876.000,00	2025
146	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gudang Warga Perumahan Tiban Palem Perumahan Tiban Palem RT.006 & RT. 007 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang Kota Batam	CV. AZZI KARYA	133/04.05/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	63.813.000,00	2025
147	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Rehab Lantai.1 Dan Pembagunan Ruangan Lantai.2 Madrasah Diniyah Takmiliyah Tiban Mentarau Bidak SB Blok J No.18 Rt.007/Rw.010 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang Kota Batam	CV. AZZI KARYA	146/04.05/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	284.707.000,00	2025
148	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Semenisasi Gang Damai Jl. H. Agus Salim Kel. Tanjungbatu Kota Kec. Kundur Karimun	CV. TINADI DARYA	590/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	179.858.000,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
149	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Penyediaan Psu Pemukiman Bida Kharisma	CV. GRACIA	357/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	179.256.000,00	2025
150	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Penyediaan PSU Pemukiman Tiban I BLOK C	CV. GRACIA	354/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	179.788.000,00	2025
151	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Penyediaan PSU Pemukiman Cipta Regency	CV. DWI RASER SEHATI	355/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	179.680.000,00	2025
152	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Penyediaan PSU Pemukiman Centra Melati	CV. DWI RASER SEHATI	356/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	179.724.000,00	2025
153	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Penyediaan PSU Pemukiman Masyeba Indah Batu Aji	CV. GRACIA	353/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	179.337.000,00	2025
154	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Batu Miring / Box Cover Jl. Sidoarjo Suili Rt.01 Rw.10 Dusun V Desa Tanjung Berlian Barat Kundur Utara	CV. TINADI DARYA	592/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	179.914.000,00	2025
155	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Psu Kampung Suka Jaya Rw.03 Kota Tanjungpinang	CV. MEGAH ENGINEERING PERSADA	580/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	212.361.000,00	2025
156	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan, Rt.04/ Rw.02 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral	CV. ZAYDEN PUTRA PERDANA	27/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	89.985.000,00	2025
157	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan, Rt.02/ Rw.05 Kelurahan Sungai Pasir, Kp Sidodadi Kabupaten Karimun	CV. ZAYDEN PUTRA PERDANA	26/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	179.959.000,00	2025
158	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan, Rt 001 Rw 05 Kelurahan Sungai Pasir, Kp Sidodadi Kabupaten Karimun	CV. ZAYDEN PUTRA PERDANA	24/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	179.968.000,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
159	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Revitalisasi tempat Ibadah HKBP Tiberias Jalan Hang Jebat Kecamatan Nongsa Kota Batam	CV. HEPNATA CHRISAMINDO	615/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/XI/2025	129.778.600,00	2025
160	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Semenisasi di Kampung Tua Belian RT 01 RW 02 Keluran Belian Kec Batam Kota	PT. KARYA SAWEL RAKEP	616/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/XI/2025	179.275.300,00	2025
161	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Revitalisasi Fasum di RT 05 RW 05 Kavling Harapan Swadaya Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong	PT. KARYA SAWEL RAKEP	614/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/XI/2025	129.291.500,00	2025
162	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Revitalisasi Lingkungan Kp. Tua Belian Kp. Tua Belian RT 01 RW 02 Kecamatan Batam Kota - Kelurahan Belian, Kota Batam., Provinsi Kepulauan Riau Batam	PT. JADI TERANG ABADI	613/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/XI/2025	177.096.400,00	2025
163	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Semenisasi Komp. Anggrek Permai RT.001 / RW 006, Kel.Baloi Indah, Kec.Lubuk Baja, Kota Batam.	CV. AGNES EKA PERDANA	603/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/X/2025	179.825.200,00	2025
164	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Permukiman Kabupaten Natuna 7	CV. ARJUNA CONSULT	513/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD-P/XI/2025	46.471.200,00	2025
165	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Semenisasi Jalan H. Johar Rt. 001 Rw 001 Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kab. Karimun Provinsi Kepulauan Riau	CV. UNGAR KARYA RAYA	587/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	179.715.000,00	2025
166	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Semenisasi Jalan Kampung Gajus RT 012 RW 005 Kelurahan Tanjung Berlian Kota Kecamatan Kundur Utara Kab Karimun Provinsikepulauan Riau.	CV. UNGAR KARYA RAYA	589/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	129.757.000,00	2025
167	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Semenisasi jalan Paya Manggis RT 006 RW 001 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun	CV. COGAN RAYA	595/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	144.808.000,00	2025
168	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran (STIQ) Kepulauan Riau - Kota Batam	CV. RAFFA TECT KONSULTAN	440/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	54.847.000,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
169	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Fasum RW 20 Kel. Sungai Langkai kec. Sagulung Kota Batam	CV. TRI KARIYA UTAMA	622/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P /XI/2025	84.745.000,00	2025
170	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Kampung Baru Meral RT.05 RW.03 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral	PT. TIGA UTAMA KONSTRUKSI	593/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	179.915.000,00	2025
171	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pembangunan PSU RT 01/RW 08 Kampung Karang Rejo Kota Tanjungpinang	CV. MEGAH ENGINEERING PERSADA	586/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	339.333.000,00	2025
172	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Semenisasi Jalan Hj Sohani RT 001 RW 004 Dusun 2 Desa Tanjung Berlian Barat Kecamatan Kundur Utara, Kab. Karimun Provinsi Kepulauan Riau	CV. COGAN RAYA	588/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	129.801.000,00	2025
173	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pembangunan PSU Perumahan Bukit Indah Lestari Kota Tanjungpinang	PT. BINTAN MUDA SUKSES	578/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	179.450.000,00	2025
174	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Permukiman Kota Batam 29	CV. TRANS KHARISMA	538/04.05/SPK/PERC-PL/DPKP-PSU/APBD-P/X/2025	34.942.800,00	2025
175	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Permukiman Kota Batam 29	PT. STUDIO EMPAT BELAS	539/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD-P/XI/2025	32.451.900,00	2025
176	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Prasarana Utilitas Di Kota Batam Perum Gbaa Tahap 5 RT 02, Kel. Sungai Langkai, Kec Sagulung, Kota Batambatam	CV. MEGAT BERTUAH	596/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/XI/2025	159.807.600,00	2025
177	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Prasarana Utilitas Di Kota Batam Perum Gbaa Tahap 5 RT 04, Kel. Sungai Langkai, Kec Sagulung, Kota Batam, Batam	CV. MEGAT BERTUAH	597/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/XI/2025	149.181.000,00	2025
178	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Penyediaan Psu Di Tanjung Unggat RT 5 RW 3 Kelurahan Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari, Belakang Pelindo	PT. BINTAN MUDA SUKSES	575/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	29.326.000,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
179	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Permukiman Kota Batam 1	PT. TUAH KARYA CONSULTANT	465/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD/VIII/2025	45.366.000,00	2025
180	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran (STIQ) Kepulauan Riau - Kota Batam	CV. LALUNA ARTHA KENCANA	91/04.05/SP/DPKP-PSU/APBD/IX/2025	567.905.590,00	2025
181	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Semenisasi Perum. Taman Baloi Mas, RT. 001, RW. 005, Kel. Baloi Indah, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam.	CV. MINIKO SEJAHTERA	611/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/XI/2025	179.865.700,00	2025
182	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Renovasi Pembangunan dan Perlengkapan Prasarana Pondok Pesantren Assalam Kel. Sei Lekop Kec. Sagulung Kota Batam	CV. MITRA ANDALAN SELARAS	308/04.05/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	134.889.000,00	2025
183	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Umum Yayasan Darma Depata Agung Kabupaten Bintan	CV. KARYA SINAR ABADI	572/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	179.763.000,00	2025
184	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Umum Klenteng Sungai Kecil, Kab.Bintan	CV. GENERASI LINTAS DIMENSI	568/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	179.853.000,00	2025
185	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana Provinsi	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Rumah Khusus Bagi Korban Bencana di Kecamatan Serasan - Kabupaten Natuna	CV. RUMBLE ENGINEERING CONSULTANT	03/04.02/SPK/PWS-PL/DPKP-PRM/APBD/VIII/2025	54.560.000,00	2025
186	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid Besar At Taubah Senayang Kabupaten Lingga	PT. BINTAN INDO PERMATA	69/04.05/SP/FSK-EC/DPKP-PSU/APBD/2025	927.221.232,68	2025
187	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan penyediaan psu perum griya batu aji asri thp4 rt 01 rw 18 kel sei langkat kec sagulung	PT. ASAHAN MEGA PLAN	605/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/XI/2025	109.939.700,00	2025
188	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Semenisasi Perum. Jupiter RW 017, Kel. Tanjung Riau, Kec. Sekupang	CV. AMORE SEJAHTERA	602/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/X/2025	119.888.800,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
189	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Semenisasi Lapangan Fasum Perum. Taman Pesona Indah RT 005 RW 009, Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji	CV. AMORE SEJAHTERA	599/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/XI/2025	99.394.400,00	2025
190	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Semenisasi Perum. Palm Regency 2, RT. 01/RW. 23, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota, Kota Batam	CV. AGNES EKA PERDANA	604/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/XI/2025	179.526.200,00	2025
191	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Semenisasi Perum. Griya Batu Aji Asri Thp IV RT 001 RW 018, Kel. Sei Langkai, Kec. Sagulung	CV. AMORE SEJAHTERA	601/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/XI/2025	107.499.400,00	2025
192	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Air Pitoe 6 Km Desa Sedanau Timur Kabupaten Natuna	CV. FITRA PUTRA PERKASA	95/04.05/SP/DPKP-PSU/APBD/IX/2025	925.500.043,00	2025
193	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Semenisasi Perum Pluto RT 004 RW 005, Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aj	CV. AMORE SEJAHTERA	600/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD-P/XI/2025	91.983.900,00	2025
194	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid Kampus Miftahul Ulum Tanjungpinang	CV. RANCANG DIMENSI KONSULTAN	489/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD/X/2025	64.952.000,00	2025
195	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Permukiman Kabupaten Karimun 7	CV. REKA BENTUK CONSULTANT	533/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD-P/2025	38.827.000,00	2025
196	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Renovasi Fasum Perum. Taman Cipta Asri Thp II RT 003 RW 021, Kel. Tembesi, Kec. Sagulung	CV. VENUS RIZ ENGINEERING	210/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	99.831.000,00	2025
197	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan PSU renovasi musholah rt 04 rw 002 kel sai pelenggut kec sagulung	CV. GANDA RIA SEJAHTERA	188/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	109.805.000,00	2025
198	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Revitalisasi Rumah Imam Masjid At-Taubah Perumahan Merlion Square,Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji, Kota Batam	CV. VENUS RIZ ENGINEERING	511/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	179.816.000,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
199	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pembuatan Drainase RT 02 RW 02 Kel Patam Lestari, Kec. Sekupang	CV. UDIN JAYA	313/04.05/ADD.1/SP/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	189.846.000,00	2025
200	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Permukiman Kabupaten Natuna 3	CV. REKAYASA ENGINEERING KONSULTAN	445/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD/VII/2025	58.467.000,00	2025
201	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Permukiman Kabupaten Natuna 4	CV. REKAYASA ENGINEERING KONSULTAN	446/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD/VII/2025	51.933.500,00	2025
202	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Batu Miring Kiri Kanan Jalan Rawa, Jalan Abdul Malik, Desa Cemaga, Kec. Bunguran Selatan, Kab.Natuna Bunguran Selatan Natuna	CV. RUMBLE ENGINEERING CONSULTANT	517/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD-P/XI/2025	24.721.900,00	2025
203	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid Kampus Miftahul Ulum Tanjungpinang	CV. JASTINDO GRADANA	316/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	581.966.490,00	2025
204	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Air Pitoe 6 Km Desa Sedanau Timur Kabupaten Natuna	CV. RUMBLE ENGINEERING CONSULTANT	441/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	89.967.000,00	2025
205	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Pelantar Beton Semente Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat - Kab. Natuna	CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN	442/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD//VIII/2025	64.949.000,00	2025
206	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan jalan penghubung batu nyodong desa payak laman - desa batu ampar Kab. Anambas	CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN	434/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	64.973.000,00	2025
207	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.01.001.000 39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Renovasi Sarana dan Prasarana Pesantren Pondok Pesantren Ushulul Huda Kavling Sungai Lekop Blok D No. 39-40-41-42 Kel. Sungai Lekop Kec. Sagulung Kota Batam	CV. MITRA ANDALAN SELARAS	148/04.05/SPK/FSK-PL/DPKP-PSU/APBD/2025	177.465.000,00	2025
208	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha	Perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di-bawah 15 (lima belas) Ha	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pekerjaan Pengawasan Teknis Perbaikan RTLH di kawasan Kumuh di Kabupaten Lingga	CV. CIPTA PERDANA TEKNIK	17/04.03/SPK/PWS-PL/DPKP-PERKIM/APBD/IX/2025	44.761.000,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
209	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.1.02.02.008.000 18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran Termijn 100% Pada Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Di Permukiman Kabupaten Natuna 8	CV. ARJUNA CONSULTANT	515/04.05/SPK/PWS-PL/DPKP-PSU/APBD-P/XI/2025	32.984.700,00	2025
210	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.1.02.03.03.0001	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pembayaran Tagihan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-Pemeliharaan Filter Air Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	CV. MEGAH ENGINEERING PERSADA	EP-01K9EHW8ZK20HST0AE18HD7M6R	19.200.000,00	2025
211	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Pembayaran Tagihan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Desember 2025 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	PT MADINA PERSADA MANDIRI	EP-01JRHHJWMWN06QEM6097DKX5SJ	82.240.000,00	2025
							JUMLAH	**30.371.929.371,91**	

B. UTANG BELANJA MODAL PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	-	Penyediaan Prasarana Sarana Perkantoran Pemerintahan Provinsi	-	-	Penataan dan Perbaikan Mesjid Raya Nur Ilahi Dompak	CV. CAHAYA PUTRI BINTAN	01.02.0001/SEKRE/PERKIM/2024	36.292.812,50	2024
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Pembayaran Termijn 100% pekerjaan Pembangunan LANDSCAPE Gedung Kntor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	CV. MEGAH ENGINEERING PERSADA	003/01.0001/SPK/SEKRE/2025	379.424.553,00	2025
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Pembayaran Termijn 100% Pekerjaan pembangunan Interior dan Peningkatan Ruang Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	CV. MEGAH ENGINEERING PERSADA	002/01.001/SPK-SEKRE/2025	399.747.000,00	2025
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Pembayaran Termijn 100% Pekerjaan pembangunan Sarana Pendukung Mushola dan parkir Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	CV. BETON PRATAMA	004/01.001/SPK/SEKRE/2025	149.050.000,00	2025
							JUMLAH	**964.514.365,50**	

LAMPIRAN 9-H

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	-
2	Penambahan Utang 2025	283.240.123,00
	Total Utang Belanja	**283.240.123,00**

A. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	5.1.02.01.010076	Belanja Pakaian Olahraga	Belanja Pakaian Olahraga	CV. KARYA SINAR ABADI	EP-01K80D87CCKX5322CHVVQ93J4P	184.468.680,00	2025
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.1.02.03.03.0001	Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	CV.MELAYU BETUAH BERKAH	57/SPK/SAT.PP-SDA/XI/2025	98.771.443,00	2025
							JUMLAH	**283.240.123,00**	

LAMPIRAN 9-I

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	-
2	Penambahan Utang 2025	120.080.000,00
	Total Utang Belanja	**120.080.000,00**

A. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	4	5	*6*	*7*	8	9	10
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi PMKS Lainnya Diluar HIV/AIDS Dan NAPZA Di Dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktifitas Lapangan	Belanja Makanan Dan Minuman Aktifitas Lapangan Pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi PMKS Lainnya Diluar HIV/AIDS Dan NAPZA Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial	CV OKAZU SUKSES ABADI	1.06.04.1.05.05/06/DINSOS/2/SP/2025	120.080.000,00	2025
							JUMLAH	**120.080.000,00**	

LAMPIRAN 9-J

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	-
2	Penambahan Utang 2025	375.197.337,00
	Total Utang Belanja	**375.197.337,00**

A. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kode bayar 0195400485712	CV. NABILLA PERMATA	EP-01K9NZWDK9PQN7D66WTBTMXB0B	188.582.229,00	2025
2	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Sosialisasi Tanggal 26 November 2025 Pada Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Sosialisasi Tanggal 26 November 2025 Pada Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan kode bayar 0195400485683	PT. RETZAN INDONUSA	EP-01KATF9NVFWFYZ0H5ADS346JPD	76.500.000,00	2025
							JUMLAH	**265.082.229,00**	

B. UTANG BELANJA MODAL PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Pendingin (AC Split 2PK) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kode Bayar 0195400427877	CV. Unisindo	-	40.515.000,00	2025
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Pendingin Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kode Bayar 0195400427872	PT. Interior Eksteriot Semangat	-	69.600.108,00	2025
							JUMLAH	**110.115.108,00**	

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	-
2	Penambahan Utang 2025	350.786.590,00
	Total Utang Belanja	**350.786.590,00**

A. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	URAIAN	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	LS Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	CV. Empat Bintang AZ-ZZ	Nomor Surat Pesanan di Inaproc EP-01K94M8BDSVPBCE820XV5X6E6H	40.036.590,00	2025
2	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	LS Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Podcast dan Pembuatan Video) Sub Keg. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	PT. Tribun Media Grafika	Nomor Surat Pesanan di Inaproc EP-01K99MEFPEFQ5QSJNVA6R0DM3Q	176.500.000,00	2025
3	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	LS Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Peringatan Hari Ibu Tahun 2025) Tanggal 17 Desember 2025 Sub Keg. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	CV. Natama Jaya	Nomor Surat Pesanan di Mbiz Market PO-211186-251215-1	21.250.000,00	2025
4	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerahkabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	LS Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub.Keg Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuaan Kewenangan Provinsi	CV. Eka Partia Nusa	Nomor Surat Pesanan di Inaproc EP-01K9VGDKV1V4WCBGJCVK94HTS6	13.000.000,00	2025
5	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerahkabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	LS Belanja Jasa Iklan/Reklame, Filem dan Pemotretan Sub.Keg Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuaan Kewenangan Provinsi	PT. Medianesia Maju Nugroho	Nomor Surat Pesanan di Inaproc EP-01K93JQRWG397Q9YHWQM29X5BK	100.000.000,00	2025
							JUMLAH	**350.786.590,00**	

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	-
2	Penambahan Utang 2025	2.741.756.801,00
	Total Utang Belanja	**2.741.756.801,00**

A. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	URAIAN	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.1.02.01.04.0133	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	Pengadaan CCTV Dan Installment	CV LOGIN KOMPUTINDO	EP-01K9XS67RC1RNHWWDZZFGTXTET	23.276.700,00	2025
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor	Belanja Sofa	CV. MITRA SAHABAT	EP-01K9EESZDN8XHT9RY7ZGFGAYSR	16.000.000,00	2025
3	Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian Dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Obat-Obatan Lainnya Pupuk Urea, Pupuk Kcl Dan Pupuk TSP Sub Kegiatan Pengendalian Dan Pemafaatan Kawasan Pertanian	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Pupuk Urea, Pupuk Kcl Dan Pupuk TSP	CV. ARTHA RAHMAN SEJAHTERA	EP-01K4VB47AC9883N4DWVWK5ZAB5	145.582.050,00	2025
4	PENATAAN PRASARANA PERTANIAN	PNEGENDALIAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN PERTANIAN	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Obat-Obatan Lainnya Pupuk NPK Sub Kegiatan Pengendalian Dan Pemafaatan Kawasan Pertanian	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Pupuk NPK	CV. CAHAYA REZEKI ANANDA	EP-01K2BM8V6QYD5EHJCSQ0S7HXQW	872.648.700,00	2025
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Belanja Bahan Bakar Minyak Dexlite dan Pertamax	PT. BAINTAN ANUGERAH BERSAMA	38/SP/PPK-DKPPKH/APBD/XI/2025	18.479.200,00	2025
6	Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian Dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Bahan-Bahan /Bibit Tanaman Benih Cabai, Benih Padi, Benih Kacang Panjang Dan Benih Sorgum	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Benih Cabai, Benih Padi, Benih Kacang Panjang Dan Benih Sorgum	CV. CAHAYA REZEKI ANANDA	EP-01K4MAJ5DYJ20KS8W4KJE0KKEB	179.908.000,00	2025
7	Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian Dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Obat-Obatan Lainnya Prevanthon, Furadan, Amistartop Dan Calaris	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Prevanthon, Furadan, Amistartop Dan Calaris	CV. ARTHA RAHMAN SEJAHTERA	EP-01K4MEC2Y3AW7DAHSMYFPD86GP	64.094.730,00	2025
8	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	5.1.02.02.01.0029	Belanja Bahan - Belanja Jasa Tenaga Ahli	Belanja Bahan - Belanja Jasa Tenaga Ahli	PT. EUROFINS ANGLER BIOCHEMLAB	EP-01K8AG71KYMOTYV9K1A3E6V45R	7.026.300,00	2025
9	Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	Belanja Sewa Sound sistem, tenda, meja dan kursi	CV. UMMU MITRA BERSAMA	EP-01KA0Y7DRZ8X06YJNE86F05EWJ	18.039.720,00	2025
10	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sapi Lokal Betina dan Jantan	PT. BUANA BINTAN SEJAHTERA	08/524/SPB-PKH/DKPPKH/APBD/XII/2025	171.800.000,00	2025
11	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Belanja Bahan Ekstrasi Dna mini kit, Microamp Fast 96 dan Micriopipet	CV KARTIKA INDAH JAYA	EP-01KB06Y6WEK5BEVGPQZ0JAPF3P	47.500.001,00	2025
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	PT. DAHKOTA PRATAMA	EP-01K7EAX0AME76QW8Y0WZDTQQKE	17.538.000,00	2025
13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	CV. LOGIN KOMPUTINDO	EP-01K75N8E72T8XC1CNZ9PE1MX1C	11.383.050,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	URAIAN	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PT. BAKRI KARYA SERVISUTAMA	EP-01JQB09VMN0VBXSHJ9FQYR48A4	10.930.000,00	2025
15	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Lainnya	Belanja Bahan Lainnya	CV KARTIKA INDAH JAYA	EP-01K87X43DAAX6T3JK4P75V2ZZ0	44.332.003,00	2025
16	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Belanja Bahan-Bahan Kimia	CV KARTIKA INDAH JAYA	EP-01KAWR5HERVNPE16WY6ZB7VKPQ	53.010.040,00	2025
17	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Belanja Obat-Obatan Lainnya	CV. HARJAYA MAJU SEJAHTERA	10/524/SPB-PKH/DKPPKH/APBD/XII/2025	25.087.110,00	2025
18	Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	CV. CAHAYA FITRI	EP-01K9V13VHP6S9NKNA15YV36QH4	22.322.100,00	2025
19	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Pakan Ayam Petelur	CV. NEGERI TIMBALAN BERTUAH	09/524/SPB-PKH/DKPPKH/APBD/XII/2025	103.304.750,00	2025
20	Penataan Prasarana Pertanian	Pnegendalian Dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Hand Traktor	PT. BAHAGIA JAYA SEJAHTERA	EP-01K9EHBMZAFXG15RKBWZ59W06D	154.068.000,00	2025
21	Penataan Prasarana Pertanian	Pnegendalian Dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Obat-Obatan Lainnya Pupuk Organik	CV. CATUR BERKAH RAHARJA	EP-01KBEWB5NF7KR68M6FSG8B435W	48.850.000,00	2025
22	Penataan Prasarana Pertanian	Pnegendalian Dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Alat Pertanian Kegiatan Polda Kepulauan Riau	CV. CATUR BERKAH RAHARJA	EP-01KBCJKYX19D1DBBHBXA2C6C94	43.755.000,00	2025
23	Penataan Prasarana Pertanian	Pnegendalian Dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Pupuk NPK	CV. CAHAYA REZEKI ANANDA	EP-01K9V2RZ593NP5VB9VKRYXXMB3	37.684.500,00	2025
24	Penataan Prasarana Pertanian	Pnegendalian Dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Mesin Pompa Air Dan Cultivator	PT TANIKAYA MULTI SARANA	EP-01KAJCDZ47PRK28PFN71GFABQA	129.929.197,00	2025
25	Penataan Prasarana Pertanian	Pnegendalian Dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Benih Jagung	CV. CAHAYA FITRI	EP-01K9TYFS7EEG2YRZG74504RK3N	129.240.000,00	2025
26	Penataan Prasarana Pertanian	Pnegendalian Dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Bibit Salak Bintan	CV. KARTIKA INDAH JAYA	PO-1012942512241	153.258.000,00	2025
27	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	CV. SINAR MANDIRI	42/SP/PPK-DKPPKH/APBD/X/2025	11.655.000,00	2025
28	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	PT. BAINTAN ANUGERAH BERSAMA	41/SP/PPK-DKPPKH/APBD/XII/2025	23.789.850,00	2025
							JUMLAH	**2.584.492.001,00**	**-**

B. UTANG BELANJA MODAL PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	URAIAN	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Komputer	Belanja Modal Pengadaan Tablet	CV LOGIN KOMPUTINDO	EP-01K9EK1D4W2M069HTCCBZ5WTFH	86.602.200,00	2025
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga (Home Use)	Belanja Bracket Standing TV Dan Televisi	CV LOGIN KOMPUTINDO	EP-01K9EGEBG6EVBMH8XQHTP0EGV9	11.710.500,00	2025
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Belanja Modal Alat Rumah Tangga (Meja Kerja)	CV. MITRA SAHABAT	EP-01K9EF6EC1T4PV3ZER0030G5H1	13.453.200,00	2025
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	5.2.02.05.02.0004	BelanjaModal Alat Pendingin	Belanja AC	CV. LOGIN KOMPUTINDO	EP-01K9EFVE72VV2TMRAY804J5VSA	20.468.400,00	2025
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Belanja Modal Alat Rumah Tangga (Karpet Ruang kantor)	CV. MITRA SAHABAT	EP-01KA0HZVTFA6W5SRF3K7MV73A8	25.030.500,00	2025
							JUMLAH	**157.264.800,00**	

LAMPIRAN 9-M

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	-
2	Penambahan Utang 2025	170.315.850,00
	Total Utang Belanja	**170.315.850,00**

A. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	Pembayaran Belanja Pemeiharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung- Bangunan Kantor	CV HEPTANA CHRISAMINDO	T/025/01/SP/LAB-DLHK/2025	53.893.500,00	2025
							JUMLAH	**53.893.500,00**	

B. UTANG BELANJA MODAL PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	URAIAN	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya (Neraca Analitik, Water Sample) Tahunn 2025 i UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup di Kota batam	PT Kisbiokim Medika Laboratori	EP-01KAAN95129AYVYKR1XSCZBB0P	62.160.000,00	2025
2	Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	5.2.02.08.02.0002	Belanja Modal Instrument Probe/Sensor	Pembayaran Belanja Modal Instrument probe/sensor Tahun 2025 Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup di Kota Batam	PT Kisbiokim Medika Laboratori	EP-01KAAMSNS6E7CX31V26N115WQZ	54.262.350,00	2025
							JUMLAH	**116.422.350,00**	

LAMPIRAN 9-N

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	-
2	Penambahan Utang 2025	52.000.000,00
	Total Utang Belanja	**52.000.000,00**

A. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pentaan, Pemberdayaan Dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, Dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	LS BJ Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Sub Keg Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan Dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat	PT. BINTAN HUA LIAN	EP-01K9Y02QPQXQA484TSHHWDJSES	52.000.000,00	2025
							JUMLAH	**52.000.000,00**	

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	-
2	Penambahan Utang 2025	3.938.375.600,43
	Total Utang Belanja	**3.938.375.600,43**

A. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	Pembayaran Termin 1 sebesar 70 % Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Tanjung Buton Kab Lingga	CV. NIRWANA JAYA	-	281.701.658,33	2025
2	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	Pembayaran sebesar 100% Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Tanjung Buton Kab Lingga	CV. NIRWANA JAYA	01/SP/REHAB HDPE TG BUTON/HUB/X/2025	211.276.243,49	2025
3	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Pembayaran 100% Pekerjaan Pengadaan Pagar Pada UPT Wilayah IV Kabupaten Natuna Dan Kepulauan Anambas	CV. PIJAR MANDIRI	01/SPK/PAGAR-NATUNA/XI/2025	54.582.383,63	2025
4	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Penguman Regional	5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan DED Rehabilitasi Pelabuhan VIP Punggur – Kota Batam	CV. CITRA KARYA	01/SPK/DED REHAB VIP PUNGGUR/HUB/X/2025	99.417.595,00	2025
5	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran 100 % Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Tanjung Buton Kabupaten Lingga	CV. ASKA PERKASA KONSULTAN	01/SPK/WAS REHAB HDPE TG BUTON/HUB/X/2025	20.910.368,70	2025
6	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Gedung Terminal Pelabuhan Dabo Singkep	Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Gedung Terminal Pelabuhan Dabo Singkep	CV. LAWANA CONSULTANT	01/SPK/WAS REHAB TERMINAL DABO SINGKEP/HUB/XI/2025	21.119.918,94	2025
7	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan Pelabuhan Tanjung Permai Kampung Beko Pulau Kasu Kota Batam	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan Pelabuhan Tanjung Permai Kampung Beko Pulau Kasu Kota Batam	CV. ARTA KINALI CONSULTANT	01/SPMK/WAS-PLB.TG.PERMAI.KASU/HUB/IX/2025	87.232.902,00	2025
8	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran 100% Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Dan Pemasangan Marka Jalan DI Kabupaten Natuna	CV. TRIKA CIPTA CONSULTAN	09/SPK/WASMARKA-NTN/HUB/XI/2025	19.796.794,50	2025
9	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Pembayaran 100% Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Dan Pemasangan APJ/LPJU Di Kabupaten Natuna	CV. BRAHMA ANANTA CONSULTANT	10/SPK/WASLPJU-NTN/HUB/XI/2025	19.657.990,11	2025
10	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Pembayaran 100% pekerjaan perencanaan pengadaan dan pemasangan marka jalan dikabupaten natuna	CV. BRAWIJAYA TEKNIK KONSULTAN	06/SPK/RENMARKA-NTN/HUB/X/2025	19.752.394,50	2025
11	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	5.1.02.01.01.0001	Belanja Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan/Pita Penggaduh/Zebra Cross di Natuna	Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan/Pita Penggaduh/Zebra Cross di Natuna	CV PIJAR MANDIRI	EP-01KAAX6AFDPHH92CAJXAK235R9	292.076.520,00	2025
							JUMLAH	**1.127.524.769,20**	

B. UTANG BELANJA MODAL PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	2	3	4	5	6	7	8	*9*	*10*
1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	Pembayaran Termin II sebesar 25% Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Permai Kampung Beko Pulau Kasu Kota Batam	PT. TRANS ASELABAR ABADI	01/SP/PLB.TG.PERMAI.KASU/HUB/IX/2025	182.704.960,05	2025
2	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	PembayaranTerminIIIsebesar25%Pekerjaan PembangunanPelabuhanTanjung Permai Kampung Beko Pulau Kasu Kota Batam	PT. TRANS ASELABAR ABADI	01/SP/PLB.TG.PERMAI.KASU/HUB/IX/2025	98.608.093,72	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	Pembayaran Termin I, II 100% Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Jagoh Kabupaten Lingga	CV. PULAU TENGGEL	01/SP/HDPE JAGOH/HUB/X/2025	1.892.580.927,46	2025
4	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	5.2.02.18.01.0002	Belanja Pengadaan dan Pemasangan APJ/LPJU di Natuna	Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Pengadaan dan Pemasangan APJ/LPJU di Natuna	CV TRANS KONSTRINDO	EP-01K9YSQKFXKQFYRR4CANZCY5MS	315.240.000,00	2025
5	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	Pembayaran 100% Pekerjaan Pembangunan Jalur Sepeda Dikota Tanjungpinang (Lanjutan)	CV. ANUGRAH BINTAN MAKMUR	EP-01K9RWN52E8N2C4815JKD7AV7M	131.240.850,00	2025
6	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	5.2.04.03.05.0009	Belanja Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan Pelabuhan Kuala Riau Tanjungpinang	Pembayaran 100% Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan Pelabuhan Kuala Riau Tanjungpinang	PT. PRISLED INNOVATIVE LIGHTING INDONESIA	EP-01KAFDA6V6YRG776CJS19VC55H	190.476.000,00	2025
							JUMLAH	**2.810.850.831,23**	

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	-
2	Penambahan Utang 2025	4.119.212.130,00
	Total Utang Belanja	**4.119.212.130,00**

A. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA DINAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG SETELAH REVIU	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Batam TV, Siaran Tunda, PT. Batam Multimedia Televisi	PT. BATAM MULTIMEDIA TELEVISI	EP-01K80GZ49W9JKRKQM1HGZ177X8	59.980.000,00	2025
2	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Diseminasi Informasi	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak Pada Sub Kegiatan Diseminasi Informasi, Bintan Jaya Abadi CV	BINTAN JAYA ABADI CV	EP-01K7KYEQPZQ5XX320QZA9ED1QP	100.889.288,00	2025
3	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Batampos.Co.Id, Advetorial, PT Batam Multimedia Korporindo	BATAM MULTIMEDIA KORPORINDO PT	EP-01K7EE0GENDK3MKP8KEZ67TMH6	97.500.000,00	2025
4	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Batam TV, Advetorial, PT. Batam Multimedia Televisi	PT. BATAM MULTIMEDIA TELEVISI	EP-01K7121XR38N7ZJ9WZETP8D0M2	153.780.000,00	2025
5	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Batam TV, Siaran Langsung, PT. Batam Multimedia Televisi	PT. BATAM MULTIMEDIA TELEVISI	EP-01K84X7DTCK8F12H27KMYPPMTG	149.990.000,00	2025
6	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Sketsanews.Id Adventorial, Sketsa Dua Pilar PT	SKETSA DUA PILAR PT	EP-01K9VC9R6BED2DY6K804ZDHKE7	49.999.994,00	2025
7	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Harianmemokepri.Com, PT Media Memo Indonesia	PT MEDIA MEMO INDONESIA	EP-01K7RQVKGRR6JN4R7MMVTRTQRJ	97.499.989,00	2025
8	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik IndePThnews.Id Advetorial, Basnil Maximi Putra, PT	BASNIL MAXIMI PUTRA, PT	EP-01K82VF4SR71EA9B2P7AEKYQ4S	179.998.000,00	2025
9	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Tribun Batam, Advetorial, Tribun Media Graf	TRIBUN MEDIA GRAF	EP-01K9TJDEHX852EEN63FFH5DRB5	49.999.994,00	2025
10	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Batam Tv, Siaran Langsung, PT. Batam Multimedia Televisi	PT. BATAM MULTIMEDIA TELEVISI	EP-01K8W7CAZ4B2K57V8EBFEW8JYW	74.995.000,00	2025
11	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Sijoritoday.Com, Advetorial, Sijori Media Serumpun PT	SIJORI MEDIA SERUMPUN PT	EP-01K82V2FDARYWFR0BE7NJ7675S	34.999.996,00	2025
12	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Katasiber.Id, Advetorial, Kepri Senada Pers PT	KEPRI SENADA PERS PT	EP-01K9TW1Y6D9KDNCBC2EA9WN8SY	49.900.006,00	2025
13	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Tribun Batam, Advetorial, Tribun Media Graf	TRIBUN MEDIA GRAF	EP-01K9RVMKREM14SQ1AA5V53VF80	150.920.000,00	2025
14	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Tribun Batam, Advetorial, Tribun Media Graf	TRIBUN MEDIA GRAF	EP-01K9C2GHX6GKYVQ6AMP3YXA4MD	179.990.000,00	2025
15	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Medianesia.Id Advetorial, Medianesia Maju Nugroho PT	MEDIANESIA MAJU NUGROHO PT	EP-01K9RVZ5J0VZ3HMZVRXQX5CZYP	97.500.000,00	2025
16	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Tribun Batam, Advetorial, Tribun Media Graf	TRIBUN MEDIA GRAF	EP-01K8W8FM6ACHZHNNH81CFX9Q7B	150.920.000,00	2025
17	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Kepri.Antaranews.Com Advetorial Dan Amplifikasi Perum Lkbn Antara	PERUM LKBN ANTARA	EP-01K5TF6TRACNMWPN588XK0DR9B	27.757.779,00	2025
18	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Bentan.Co.Id Advetorial, Bentan Media Jaya PT	BENTAN MEDIA JAYA PT	EP-01K71FCDWV2Q1EPVH6QGK0B4KA	74.999.992,00	2025
19	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Batam TV, Siaran Langsung, PT Batam Multimedia Televisi	PT. BATAM MULTIMEDIA TELEVISI	EP-01KB2B5NAEQAG9B4D4HH9GDG6V	74.995.000,00	2025
20	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Batam TV, Dialog/Talkshow, PT. Batam Multimedia Televisi	PT. BATAM MULTIMEDIA TELEVISI	EP-01K80H52DDD7658FZPWCQ5QGS0	99.980.000,00	2025
21	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Ulasan.Co, Advetorial, Inspirasi Rakyat Kepri PT	INSPIRASI RAKYAT KEPRI PT	EP-01KADEYQ8M3MMKPP48VGWCCZC7	39.999.996,00	2025
22	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Batamnews.Co.Id, Advetorial, PT. Batam Media Siber	PT. BATAM MEDIA SIBER	EP-01K806WDDR4PW8E1J1R6FQP9M3	30.000.000,00	2025
23	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Seputarkita.Co Advetorial, PT Kata Kita Pers	PT.KATA KITA PERS	EP-01K9V652HP6E8N81AVTRY65RYB	49.999.994,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG SETELAH REVIU	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
24	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Radio Onine Radio Diva Ruby Swarindo PT	RADIO DIVA RUBY SWARINDO PT	EP-01K69ST42NWR0Y2C8KR72EKKQG	56.000.006,00	2025
25	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Alreinamedia.Com, Advetorial, Alreina Media Sukses PT	ALREINA MEDIA SUKSES PT	EP-01K9T48CQMQ69TCRHRZMS0H4BV	45.000.000,00	2025
26	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Onine Greeting Radio Diva Ruby Swarindo PT	RADIO DIVA RUBY SWARINDO PT	EP-01K8MP16AEAZSRMMNR9R4ZV1JQ	143.640.216,00	2025
27	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Tribun Batam, Advetorial, Tribun Media Graf	TRIBUN MEDIA GRAF	EP-01KATG1GKBX26P1TVDJCYSYHZJ	113.190.000,00	2025
28	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Batam.Tribunnews.Com, Advetorial, Tribun Media Graf	TRIBUN MEDIA GRAF	EP-01K9T4MR3YJM3X1V83VSMCVSAD	122.500.000,00	2025
29	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemda	5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video Dan Film	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video Dan Film Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemda Ahmadan Media Integrasi PT	PT AHMADAN MEDIA INTEGRASI	EP-01K7RRBGFB1BEF6N32N920ZK1P	25.850.000,00	2025
30	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemda	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlangganan	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemda, PT Dinamika Karya Adicita	PT DINAMIKA KARYA ADICITA	EP-01K8WE60KS5FWWF8GGNMXE4F5F	29.500.000,00	2025
31	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyediaan Spbe	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlangganan	Belanja Jasa Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlangganan Biaya Langganan Internet 1 Gbps Untuk Bulan November-Desember 2025 Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyediaan Spbe, PT Medianusa Permana	PT MEDIANUSA PERMANA	01/SPN/PPK/DKI/I/2025	242.300.000,00	2025
32	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyediaan Spbe	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlangganan	Belanja Jasa Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlangganan Biaya Langganan Internet 1 Gbps Untuk Bulan November-Desember Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyediaan Spbe, PT Interlink Technology	INTERLINK TECHNOLOGY	02/SPN/PPK/DKI/I/2025	243.700.000,00	2025
33	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Batam Tv, Siaran Langsung, PT Batam Multimedia Televisi	PT. BATAM MULTIMEDIA TELEVISI	EP-01K9RTKGEADT7AWHFRQKRJNHN7	149.990.000,00	2025
34	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Diseminasi Informasi	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Diseminasi Informasi, Harimau Sumatera Cv	HARIMAU SUMATERA CV	EP-01K8WS28VPQFS2G4CZR8BVDMTH	182.300.000,00	2025
35	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Batam Tv, Siaran Tunda, PT. Batam Multimedia Televisi	PT. BATAM MULTIMEDIA TELEVISI	EP-01KBC2W8A7XFF00Z0VZGGWE7AF	59.980.000,00	2025
36	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Diseminasi Informasi	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Diseminasi Informasi, PT Sentosa Global Energi	PT. SENTOSA GLOBAL ENERGI	EP-01K8MPJ54K9NF0V9WECFBE5P46	15.984.000,00	2025
37	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Diseminasi Informasi	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Diseminasi Informasi, PT Sentosa Global Energi	PT. SENTOSA GLOBAL ENERGI	EP-01K9V5W4FHM80R01JPTQYMTY8Y	15.984.000,00	2025
38	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Diseminasi Informasi	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak Pada Sub Kegiatan Diseminasi Informasi, Sasino Jaya Cv	SASINO JAYA CV	EP-01K9RTYJ9510Z897335Z0VZJKD	94.563.120,00	2025
39	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Diseminasi Informasi	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak Pada Sub Kegiatan Diseminasi Informasi, PT Aswindra Berkah Abadi	PT ASWINDRA BERKAH ABADI	EP-01K9V71EPRRYRB8E8C3QHC7T3N-AD01	49.430.076,00	2025
40	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Batam Tv, Advetorial, PT. Batam Multimedia Televisi	PT. BATAM MULTIMEDIA TELEVISI	EP-01K9RV88JTFTWMGF6V15XPCTY2	153.780.000,00	2025
41	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Onine, Advetorial, Radio Diva Ruby Swarindo PT	RADIO DIVA RUBY SWARINDO PT	EP-01K9T4GB2QF6MEDFJSJBJ8JRB1	80.000.009,00	2025
42	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Diseminasi Informasi	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak Pada Sub Kegiatan Diseminasi Informasi, Samudera Karya Utama Cv	SAMUDERA KARYA UTAMA CV	EP-01K9RTTNJ47AS3ANJQ60EVD480	128.751.675,00	2025
43	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Batam Tv, Greeting, PT. Batam Multimedia Televisi	PT. BATAM MULTIMEDIA TELEVISI	205/01.24/SP/DKI/XI/2025	90.174.000,00	2025
							JUMLAH	**4.119.212.130,00**	

LAMPIRAN 9-Q

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	-
2	Penambahan Utang 2025	1.121.027.548,00
	Total Utang Belanja	**1.121.027.548,00**

A. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Pada Sub Keg. Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	CV. REZEKI LANGGENG ABADI	EP-01K7EAGWBWE379E584DEZR7XY0	62.000.000,00	2025
2	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah. Akses Pasar ,Akses Pembiayaan dan Restrukturisasi Usaha	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan kepada PT. Nusantara Data Service Pada Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah. Akses Pasar ,Akses Pembiayaan dan Restrukturisasi Usaha	PT. Nusantara Data Service	EP-01K8MY9F2JP03FF81MQEBME840	325.000.000,00	2025
3	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan GOTVP Pada Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	PT. Gonet Media Berkah	EP-01K7ZM7E38DNQAM1ZAZV9D41M2	49.284.000,00	2025
4	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Pada Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	PT. TERAS MEDIA KEPRI	EP-01K7R58P1P82J0MDC9PSK4QABG	90.909.000,00	2025
5	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Pada Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025	CV. ANT BINTANG UTAMA	EP-01K9TRH8836PAFK26T311B1J1Q	49.600.000,00	2025
6	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan (Sertifikasi Halal Reguler	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan (Sertifikasi Halal Reguler) Pada Sub Keg. Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha pada Dinas KUKM Prov. Kepri kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika	(LPPOM) Provinsi Kepulauan Riau	EP-01K7ZZHAXEG7DH5Q2FW796RP3C	349.999.983,00	2025
7	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	CV. SINAR PERKASA MULIA	RFQ-127798-251126-2	27.513.900,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
8	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Asta Cita) pada Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan TA.2025	CV. MELIA PRATAMA	RFQ-127798-251128-2	27.972.000,00	2025
9	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/ Diserahkan Kepada Masyarakat	Belanja Barang untuk Dijual/ Diserahkan Kepada Masyarakat pada Sub Keg. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	CV. AZR BINTAN BERTUAH	PO-127798-251212-3	14.985.000,00	2025
10	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Pada Sub Keg. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik pada Dinas KUKM Provinsi Kepulauan Riau	CV. Semangat Jaya	EP-01KBF4NQSFNKPW7NJSZRAEE7R2	11.259.001,00	2025
11	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi	Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi Pada Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik pada TA 2025	CV. Semangat Jaya	001/SPK/DKUKM/02.1.01.0001/2025	112.504.664,00	2025
							JUMLAH	**1.121.027.548,00**	

LAMPIRAN 9-R

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	-
2	Penambahan Utang 2025	1.287.016.801,00
	Total Utang Belanja	**1.287.016.801,00**

A. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	LS - Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara "Belanja Jasa Event Organizer Profesional Pelaksanaan Pemuda Fest"	DUBAI KARYA CV	EP-01K945FP2R26H5RKM2753S59F9	199.950.000,00	2025
2	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	LS - Belanja Sewa Hotel "Belanja Penginapan"	ANEKA SARANA SENTOSA PT	EP-01K9EWBEF6JXJMTD83CT3JRXAX	50.560.000,00	2025
3	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	LS - Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Mata Kegiatan Kejurda Atletik	SINAR MANDIRI CV	EP-01KAB8MGZWX4T5QMAT1510235A	10.323.000,00	2025
4	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	LS - Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan Final Kejurnas 3X3	KHAYLA CATERING CV	EP-01KAD58ZK5GECF2TXTN1816Y3B	53.984.000,00	2025
5	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	LS - Belanja Sewa Hotel Kegiatan Kejurda Atletik	ANEKA SARANA SENTOSA PT	EP-01KADDS52WVJN5PVQQ5STS907Y	104.280.000,00	2025
6	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	LS - Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Kegiatan Pelatihan Pelatih Atletik	RIZTOUR INDO WISATA PT	EP-01KADQZSBYB82YSFXASE0YNQFQ	20.160.000,00	2025
7	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	LS - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Kegiatan Pelatihan Pelatih Cabor Atletik	ANEKA SARANA SENTOSA PT	EP-01KAAGWQT2R4HZQPCDWP1G5B5E	91.520.000,00	2025
8	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	LS - Belanja Pakaian Olahraga Kegiatan Pelatihan Pelatih Atletik	BERKAH JAYA APPAREL	EP-01K8A8V1M7G403345XADBHHVAN	20.264.000,00	2025
9	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	LS - Belanja Sewa Hotel Kegiatan Pelatihan Pelatih Cabor Atletik	ANEKA SARANA SENTOSA PT	EP-01KADSNJAMM02K7NXZRQRCVMPV	75.840.000,00	2025
10	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	LS - Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan Final Kejuaraan Nasional Basket 3x3	PT SIMPLE KREASI MANDIRI	EP-01KAFQDZIMP10V68ANPAWDF6KF	195.000.000,00	2025
11	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	Ls - Belanja Sewa Peralatan Umum Kegiatan Kejurda Atletik	KATAKITA CITA NUSANTARA	EP-01KAWSPX6RGS6SRRW7NEZSE0EQ	11.820.000,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
12	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Ls - Belanja Sewa Hotel Kegiatan Final Kejuaraan Nasional Basket 3x3	RETZAN INDONUSA	EP-01K9Y395S0TX3KMW5WKGC5KWPS	132.720.000,00	2025
13	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Ls - Belanja Jasa Penyelenggara Acara Kejuaraan Daerah Road Race Piala Ketua Dprd Kepri	KARUNIA PRATAMA CV	EP-01KAD1NFQXX4Z1MR1HAD5AMN1M	197.000.001,00	2025
14	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayana	Pembayaran Belanja Makan Minum PPLPD Sepak Bola Bulan Desember 2025	CATERING MAK ROHA CV	5/ADD.SP/DISPORA/01.01/2025	26.160.000,00	2025
							JUMLAH	**1.189.581.001,00**	

B. UTANG BELANJA MODAL PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	BERKAH PENDI CV	EP-01K9P52YQ5NDSFCH7DQ3AA9TTC	97.435.800,00	2025
							JUMLAH	**97.435.800,00**	

LAMPIRAN 9-S

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	-
2	Penambahan Utang 2025	120.208.560,00
	Total Utang Belanja	**120.208.560,00**

A. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA DINAS KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	LS Belanja Jasa Tenaga Kesenian Dan Kebudayaan (Belanja Jasa Produksi Seni Budaya) Pada Sub Keg Kapasitas Tata Kelola	CV. BEE UNIVERSE	004/SP-DISBUD/4.0/X/2025	20.246.400,00	2025
2	Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	LS Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Jasa Event Organizer) Pada Sub Keg Kapasitas Tata Kelola	CV. BEE UNIVERSE	002/SP-DISBUD/4.0/X/2025	99.962.160,00	2025
							JUMLAH	**120.208.560,00**	

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	-
2	Penambahan Utang 2025	204.507.954,00
	Total Utang Belanja	**204.507.954,00**

A. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG SETELAH REVIU	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	LS - BJ atas Pembayaran Pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Bahan Cetak (Kalender duduk dan X Banner) Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	SINAR MANDIRI.CV	14/SP/01.07/DPK XII/XI/2025	15.492.714,00	2025
2	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	LS - BJ atas Pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	SINAR PERKASA MULIA CV	15/SP/01.07/DPK XII/XI/2025	11.526.240,00	2025
3	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	LS - BJ atas Pembayaran Pekerjaan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Advetorial/Galeri Foto) Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	TRIBUN MEDIA GRAFIKA PT	10/SP/01.07/DPK XII/XI/2025	144.300.000,00	2025
							JUMLAH	**171.318.954,00**	

B. UTANG BELANJA MODAL PADA PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	LS - BM atas Pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Personal Komputer (Laptop) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PT AYOOKLIK BATAM JAYA	04/SP/06.02/DPK XI/XI/2025	17.094.000,00	2025
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	LS-BM Atas Pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (Kamera Digital) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PT AYOOKLIK BATAM JAYA	05/SP/06.02/DPK XI/XI/2025	16.095.000,00	2025
							JUMLAH	**33.189.000,00**	

LAMPIRAN 9-U

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	-
2	Penambahan Utang 2025	402.741.268,00
	Total Utang Belanja	**402.741.268,00**

A. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	LS-BJ : Pembayaran Belanja Makan dan Minuman Rapat - Paket Meeting Fullboard (EKA 6) (12)	PT. PELANGI WISATAMA INDAH	EP-01KA0QFQRBE3XPD0A8S1F1EY67-AD01	114.695.000,00	2025
2	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportas	LS-BJ : Pembayaran 100% Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan Kelong Apung Dengan kapal 2 GT Beserta Kelengkapannya Untuk Nelayan Kab. Kepulauan Anambas (12)	CV. ABBASY DAYATAMA	PPK-SPK/PT/KP-KKA/02/X/2025	14.867.340,00	2025
							JUMLAH	**129.562.340,00**	

B. UTANG BELANJA HIBAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	LS-BJ : Pembayaran 100% Pekerjaan Pengadaan Kelong Apung Dengan Kapal Beserta Kelengkapannya Untuk Nelayan Kab. Kepulauan Anambas (EKA. 6) (12)	CV. HIJAU BERTUAH	EP-01K8N1D61X3TEVR0ZTRR3PHME0	273.178.928,00	2025
							JUMLAH	**273.178.928,00**	

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	-
2	Penambahan Utang 2025	1.831.753.784,00
	Total Utang Belanja	**1.831.753.784,00**

A. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA DINAS PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Event Empat Budaya Satu Tenun Harmoni 2025 di Batam Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	PT. KATAKITA CITA NUSANTARA	PO-414501-251112-1	198.950.000,00	2025
2	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Buku Agenda) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	CV SINAR PERKASA MULIA	EP-01K8WKWG8M1RE8VFXTN2BPBHE3	65.855.785,00	2025
3	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dukungan Event Spirit of Tatung Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	CV LAVENDER MULTIMEDIA	PO-414501-251113-1	199.050.000,00	2025
4	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/Reklame (Pembuatan Konten Video Promosi Pariwisata Wilayah Kab. Bintan) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	PT. BATAM MULTIMEDIA TELEVISI	EP-01K9EKWWF26Q7X136QEPQHM8D8	45.000.000,00	2025
5	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/Reklame (Pembuatan Konten Video Promosi Pariwisata Wilayah Kab. Anambas) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	PT. BATAM MULTIMEDIA TELEVISI	EP-01K9VWN4NT98HQJMVBG7SCJPXP	121.500.000,00	2025
6	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/Reklame (Pembuatan Konten Video Promosi Pariwisata Wilayah Kab. Lingga) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	PT. BATAM MULTIMEDIA TELEVISI	EP-01K9VX2103Q1R25YAHN5G38JSX	53.100.000,00	2025
7	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/Reklame (Pembuatan Konten Video Promosi Pariwisata Wilayah Kab. Karimun) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	PT. BATAM MULTIMEDIA TELEVISI	EP-01K9VX7C9YV7KAFGDC1CHWTBCN	53.100.000,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
8	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/Reklame (Pembuatan Konten Video Promosi Pariwisata Wilayah Kab. Natuna) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	PT. BATAM MULTIMEDIA TELEVISI	EP-01K9VWWK4Y48693PHJ824YBPHG	126.500.000,00	2025
9	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/Reklame (Pembuatan Konten Video Promosi Pariwisata Wilayah Batam) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	PT. BATAM MULTIMEDIA TELEVISI	EP-01K9EMA8V5703W04XQ14YHNV4R	50.000.000,00	2025
10	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/Reklame (Sewa Videotron) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	PT. SENTOSA GLOBAL ENERGI	EP-01K387WZ359H12ZP592EGA4N6Z	130.499.999,00	2025
11	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pembayaran Belanja Jasa Event Organizer Dukungan Event Satu Nadi Empat Warna di Batam Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	PT. KATAKITA CITA NUSANTARA	PO-414501-251121-2	199.450.000,00	2025
12	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	Pembayaran Belanja Sewa Peralatan Umum Dukungan Event Kepri Art & Culture Internasional 2025 Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	CV LAVENDER MULTIMEDIA	PO-414501-251124-2	129.230.000,00	2025
13	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/Reklame (Pembuatan Konten Video Promosi Pariwisata Wilayah Tanjungpinang) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	PT. BATAM MULTIMEDIA TELEVISI	EP-01K9EM3FWG2N8QKQDRECCQRFHK	60.000.000,00	2025
14	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Dukungan Event Kepri Art & Culture Internasional 2025 Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	CV MAIRATAMA ABADI	EP-01KATA540DWS44FC98JN7ZFXC5	128.000.000,00	2025
15	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dukungan Event Artopia of Bintan Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	CV CAKRA MULIA SEJAHTERA	PO-414501-251127-2	99.394.000,00	2025
16	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Brosur dan Booklet) Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	CV GARIS WARNA MEDIA	EP-01K8WJX18M0K1BD4H6AK1J7MGX	123.040.000,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
17	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pembayaran Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Dukungan Event Gurindam 12 Purnama Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	CV SEMBANG TERUNA	PO-414501-251204-1	49.084.000,00	2025
							JUMLAH	**1.831.753.784,00**	

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	-
2	Penambahan Utang 2025	7.623.032.340,00
	Total Utang Belanja	**7.623.032.340,00**

A. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran Dan Terjunan Air, Gerakan Dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut Dalam Wilayah Provinsi	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Belanja Konsultan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Tenaga Surya di Kota Batam	PT. KEMILAU CAHAYA PERKASA	11/SPK/PWS.PJUTS-BTM/ENERGI/X/2025	53.280.000,00	2025
2	Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran Dan Terjunan Air, Gerakan Dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut Dalam Wilayah Provinsi	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Belanja Konsultan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Tenaga Surya di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	PT. KEMILAU CAHAYA PERKASA	10/SPK/PWS.PJUTS-TPI/ENERGI/X/2025	26.640.000,00	2025
3	Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran Dan Terjunan Air, Gerakan Dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut Dalam Wilayah Provinsi	Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	5.1.02.03.04.0100	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Termin 100% Revitalisasi Panel Surya PLTS Terpusat di Pulau Telang Kabupaten Bintan (Solar Cell)	PT. FATIH MITRA ENERGI	EP-01K8ADVPXSVWF2H6JV5EEH4CR2	91.575.000,00	2025
4	Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi Yang Dilakukan Oleh Pemangku Kepentingan Di Tingkat Daerah Provinsi	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Biaya Sewa Billboard/Papan Reklame (tipe 3)	PT. SIJORI INTERBINTANA PERS	EP-01K8512MJKP7TVDS57J2RWMPK2	50.000.000,00	2025
5	Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi Yang Dilakukan Oleh Pemangku Kepentingan Di Tingkat Daerah Provinsi	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Biaya Sewa Billboard/Papan Reklame (tipe 2)	PT. SIJORI INTERBINTANA PERS	EP-01K82YC32E14GREJQQ3D3AV04F	42.000.000,00	2025
6	Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi Yang Dilakukan Oleh Pemangku Kepentingan Di Tingkat Daerah Provinsi	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Pekerjaan Cetak Spandul/Baliho	PT. SIJORI INTERBINTANA PERS	EP-01K85D00D9GM8A9JN6QSVJBVEP	12.844.000,00	2025
7	Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Perdesaan	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Termin 100% Penyediaan Listrik Rumah Penduduk miskin Di Kota Batam	PT. JARI TRIMINDO	EP-01K972WHM10RCK4TTE9SS56Q6C	56.943.000,00	2025
8	Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electricgenerating Set (Pemeliharaan Mesin Genset)	PT. JARI TRIMINDO	09/SPK/HAR.GENSET/LISTRIK/X/2025	94.143.540,00	2025
							JUMLAH	**427.425.540,00**	

B. UTANG BELANJA MODAL PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran Dan Terjunan Air, Gerakan Dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut Dalam Wilayah Provinsi	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Termin 100% Pengadaan dan Pemasangan PJU PLTS di Kota Tanjungpinang	PT. MEGA ALWATHON SEJAHTERA	EP-01K7NEAGB428R66G94EP5ASEV4	270.396.000,00	2025
2	Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran Dan Terjunan Air, Gerakan Dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut Dalam Wilayah Provinsi	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Termin 100% Pengadaan PJU PLTS di Kota Batam	PT. MEGA ALWATHON SEJAHTERA	EP-01K83CBG1HCRE69E2G4T39ZQ70	5.218.642.800,00	2025
3	Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran Dan Terjunan Air, Gerakan Dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut Dalam Wilayah Provinsi	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Termin 100% Pengadaan dan Pemasangan PJU PLTS di Kabupaten Karimun	PT. BINTAN MUDA SUKSES	EP-01K7NBRP8ZSP1D7NK39F22XAC5	459.816.000,00	2025
4	Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran Dan Terjunan Air, Gerakan Dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut Dalam Wilayah Provinsi	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Termin 100% Pengadaan PJU PLTS di Kabupaten Bintan	PT. MALIKA BINTAN GEMILANG	EP-01K8J69Y2N4ZZ8GPDF8Z2XFM1G	1.203.795.000,00	2025
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	BELANJA MODAL PERSONAL KOMPUTER LAINNYA (PRINTER)	CV UNISINDO	EP-01K6M5J1C0NZC1VRC8M18JYW9Q	10.545.000,00	2025
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	BELANJA MODAL PERSONAL KOMPUTER (PC-LAPTOP)	CV UNISINDO	EP-01K9NAZSJ866TB382QH9CRFTHD	32.412.000,00	2025
							JUMLAH	**7.195.606.800,00**	

LAMPIRAN 9-X

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	-
2	Penambahan Utang 2025	256.815.000,00
	Total Utang Belanja	**256.815.000,00**

A. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA DINAS PERINDUSTRAIN DAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG SETELAH REVIU	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di SKPD	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/reklame, Film, Pemotretan	Belanja Jasa Iklan/reklame, Film, Pemotretan (Media Publikasi Advetorial di Batam)	PT. Tribun Media Grafika	EP-01K9RNB8A40H44V8GFC8WGZ34R	186.000.000,00	2025
							JUMLAH	**186.000.000,00**	

B. UTANG BELANJA MODAL PADA DINAS PERINDUSTRAIN DAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG SETELAH REVIU	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Honda ADV 160 ABS)	PT. Capella Dinamik Nusantara	EP-01K98W12X2EBRYVWDG8GR48NW-AD01	39.930.000,00	2025
2	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Honda Vario 160 ABS)	PT. Capella Dinamik Nusantara	EP-01KA88ACW202D9TJFHXW715Q7P	30.885.000,00	2025
							JUMLAH	**70.815.000,00**	

LAMPIRAN 9-Y

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	-
2	Penambahan Utang 2025	1.669.791.686,00
	Total Utang Belanja	**1.669.791.686,00**

A. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA BIRO UMUM TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Desember 2025	PT. BAKRI KARYA SERVISUTAMA	B/000.1.6/001/ADD.SP.E/B.UM/2025	54.000.000,00	2025
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	CV. PERTIWI SAKTI	PO-270443-250909-1	367.880.000,00	2025
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Belanja Tenaga Kebersihan (Batam) Bulan Desember 2025	PT. BAKRI KARYA SERVISUTAMA	B/000.1.8.6/002/SP.E/B.UM/2025	51.079.000,00	2025
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Belanja Tenaga Kebersihan (Tanjungpinang) Bulan Desember 2025	PT. BAKRI KARYA SERVISUTAMA	B/000.1.8.6/001/SP.E/B.UM/2025	251.644.000,00	2025
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor (Komplek Perkantoran Kantor Gubernur Prov. Kepri Di Dompak)	CV. KARTIKA INDAH JAYA	PO-270443-251103-1	157.585.567,00	2025
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor (Komplek Perkantoran Kantor Gubernur Prov. Kepri Di Dompak)	CV. KARTIKA INDAH JAYA	PO-270443-251104	177.675.852,00	2025
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor (Komplek Perkantoran Kantor Gubernur Prov. Kepri Di Dompak)	CV. KARTIKA INDAH JAYA	PO-270443-251125-1	149.312.205,00	2025
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor (Komplek Perkantoran Kantor Gubernur Prov. Kepri Di Dompak)	CV. KARTIKA INDAH JAYA	PO-270443-251125-2	61.891.915,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor (Komplek Perkantoran Kantor Gubernur Prov. Kepri Di Dompak)	CV. KARTIKA INDAH JAYA	PO-270443-250815-1	51.363.347,00	2025
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	CV. MEGAH ALAM BINTAN	B/000.1.9/247/SP/B.UM/2025	49.966.000,00	2025
11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	CV. MEGAH ALAM BINTAN	B/000.1.9/146/SP/B.UM/2025	49.920.000,00	2025
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	CV. MEGAH ALAM BINTAN	EP-01KBD5J347TWNRKHXYYRHQ3J6ZX	59.473.800,00	2025
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan Dan Minuman Jamuan Tamu	Belanja Makanan Dan Minuman Jamuan Tamu	CV. PERMATA MAHAL	B/000.32/214/SP/B.UM/2025 (TERLAMPIR)	49.500.000,00	2025
							JUMLAH	**1.531.291.686,00**	

B. UTANG BELANJA MODAL PADA BIRO UMUM TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Belanja Modal Alat Pendingin	PT. CAHAYA GIGA CEMERLANG	PO-270443-251129-1	138.500.000,00	2025
							JUMLAH	**138.500.000,00**	

LAMPIRAN 9-Z

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	538.945.400,00
2	Penambahan Utang 2025	1.237.039.017,00
	Total Utang Belanja	**1.775.984.417,00**

A. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT DPRD TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Penunjang Peningkatan Jaringan Informasi Terpadu	-	-	-	Pekerjaan Belanja Sewa Bandwicth / Internet bulan Januari 2017	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk	-	50.000.000,00	2017
2	Penunjang Peningkatan Jaringan Informasi Terpadu	-	-	-	Pekerjaan Belanja Sewa Bandwicth / Internet bulan Februari 2017	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk	-	48.136.000,00	2017
3	Penunjang Peningkatan Jaringan Informasi Terpadu	-	-	-	Pekerjaan Belanja Sewa Bandwicth / Internet bulan Maret 2017	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk	-	48.136.000,00	2017
4	Penunjang Peningkatan Jaringan Informasi Terpadu	-	-	-	Pekerjaan Belanja Sewa Bandwicth / Internet bulan April 2017	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk	-	48.136.000,00	2017
5	Penunjang Peningkatan Jaringan Informasi Terpadu	-	-	-	Pekerjaan Belanja Sewa Bandwicth / Internet bulan Mei 2017	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk	-	48.136.000,00	2017
6	Penunjang Peningkatan Jaringan Informasi Terpadu	-	-	-	Pekerjaan Belanja Sewa Bandwicth / Internet bulan Juni 2017	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk	-	48.136.000,00	2017
7	Penunjang Peningkatan Jaringan Informasi Terpadu	-	-	-	Pekerjaan Belanja Sewa Bandwicth / Internet bulan Juli 2017	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk	-	48.136.000,00	2017
8	Penunjang Peningkatan Jaringan Informasi Terpadu	-	-	-	Pekerjaan Belanja Sewa Bandwicth / Internet bulan Agustus 2017	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk	-	48.136.000,00	2017
9	Penunjang Peningkatan Jaringan Informasi Terpadu	-	-	-	Pekerjaan Belanja Sewa Bandwicth / Internet bulan September 2017	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk	-	48.136.000,00	2017
10	Penunjang Peningkatan Jaringan Informasi Terpadu	-	-	-	Pekerjaan Belanja Sewa Bandwicth / Internet bulan Oktober 2017	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk	-	48.136.000,00	2017
11	Penunjang Peningkatan Jaringan Informasi Terpadu	-	-	-	Pembayaran Pekerjaan Belanja Sewa Bandwicth / Internet bulan November 2017	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk	-	48.136.000,00	2017
12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Perjalanan Dinas Biasa			7.585.400,00	2024
13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Pembayaran SPM LS Belanja Jasa Tenaga Kebersihan / Belanja Jasa Cleaning Service & Jasa Pekerja Taman Bulan November 2025	PT. MADINA PERSADA MANDIRI	01/ADD/E-PURCHASING/SP-JKK/SET-DPRD/APBD/II/2025 Tanggal 14 Februari 2025	151.612.091,00	2025
14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Pembayaran SPM LS Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Belanja Jasa Cleaning Service & Jasa Pekerja Taman Bulan Desember 2025	PT. MADINA PERSADA MANDIRI	01/ADD/E-PURCHASING/SP-JKK/SET-DPRD/APBD/II/2025 Tanggal 14 Februari 2025	151.611.999,00	2025
15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Pembayaran SPM LS Belanja Jasa outsourcing Belanja Jasa Tenaga Supir	PT. MADINA PERSADA MANDIRI	EP-01K8MKRSECEEMHXB3H6Q6FESTT Tanggal 28-10-2025	77.200.500,00	2025
16	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Pembayaran SPM LS Belanja Jasa outsourcing Belanja Jasa Tenaga Supir	PT. MADINA PERSADA MANDIRI	EP-01K8MKRSECEEMHXB3H6Q6FESTT Tanggal 28-10-2025	77.200.500,00	2025
17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembayaran SPM LS Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Renovasi Ruang Kerja	PT. MELAYU SERANTAU	05/SPK/0001.09.0009/APBD-P/SET-DPRD/XI/2025 Tanggal 10-11-2025	336.590.302,00	2025
18	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	Pembayaran SPM LS Belanja Konsultasi Perencanaan Arsitek-Jasa Desain Arsitektural	CV. DE ROEPA ARSITEK	07/SPK/0002.09.0011/APBD-P/SET-DPRD/XI/2025	96.570.000,00	2025
19	Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Pengajuan SPM-LS Belanja Jasa Tenaga Ahli (IT Database) Oktober s.d Desember 2025	CV. RIQCOM SERVICES	03/B-JTAK/SPK/APBD/SET-DPRD/I/2025	47.400.000,00	2025
							JUMLAH	**1.477.130.792,00**	**-**

B. UTANG BELANJA MODAL PADA SEKRETARIAT DPRD TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Pembayaran SPM LS Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	CV. AL WATHON MAKMUR	EP-01K9C44RGRX14XDS26XJ04XB1J Tanggal 7-11-2025	298.853.625,00	2025
							JUMLAH	**298.853.625,00**	**-**

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	-
2	Penambahan Utang 2025	1.097.072.188,00
	Total Utang Belanja	**1.097.072.188,00**

A. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan Diluar Kantor	Dibayarkan belanja makanan dan minuman rapat (satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor) kepada PT. HOTEL PRIMA MITRA BARELANG (Aston Hotel & Residences)	BEBEN SUBEKTI	EP-01KB24X0KPCB0AWYCZD5NVK55S	87.500.000,00	2025
2	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Cetak Piagam Penghargaan)	Dibayar belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak (cetak piagam penghargaan) kepada CV TIGA CAHAYA ELZIAN	ELZORA DINATA	EP-01KASQP10N51KWAQG1R35F6HFR	22.200.000,00	2025
3	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultan IT Pengembangan Aplikasi Opsen	Pembayaran Belanja Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik pada Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	MUKMINUN	003/SPMK/Non Tender/BAPENDA/XI/2025	48.800.000,00	2025
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Ribbon Catridge Epson LQ-590)	CV. NAPOSO HARAPAN JAYA	EP-01KBCD0K8116ABN22VCEQYVF6V	17.000.000,00	2025
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata (Paper Bag) pada Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	CV. MEDIA INSANI MANDIRI	EP-01KAAHWHGDQ9G1RW2W39ESGY87	56.000.000,00	2025
6	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak Daerah	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan (Videotron)	EFENDY	EP-01KAX18STCCEM5DK2YTZ8GAY7A	32.200.000,00	2025
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Cetak Laporan)	CV. MEDIA INSANI MANDIRI	EP-01KAK5RDVQANFF8198KK8PGA73	27.240.000,00	2025
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi (Partisi Ruang Polisi Lantai 3)	PT CITRA KARUNIA PERSADA	EP-01KAAY06KTF0GT6YVNKD78PXTE	73.180.000,00	2025
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi (Partisi Lantai 3 Ruangan Pendapatan)	PT CITRA KARUNIA PERSADA	EP-01KA0HDRW91X908YVW7PK000AH	98.970.000,00	2025
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman (Pemeliharaan Taman Graha Kepri) bulan November-Desember	CV. AGRO SELARAS	002/SP/E-KATALOG/SEKRE/BAPENDA/I/2025	34.200.000,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	Pembayaran Belanja Jasa Pembersih, Pengendalian Hama dan Fumigasi (Pest Control) bulan November-Desember 2025	CV. BIO CLEANINDO	005/SP/E-KATALOG/SEKRE/BAPENDA/I/2025	34.320.000,00	2025
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Pengembalian Dana atas Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang dengan no transaksi bank no PG11135454399100 - RETUR 240925	PT KARYA IHSAN SEJAHTERA	027/ /BAPENDA /VIII/2025	1.627.290,00	2025
13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Pengembalian Dana atas Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang dengan no transaksi bank no PG11152654399665 - RETUR 240925	PT KARYA IHSAN SEJAHTERA	027/ /BAPENDA /VIII/2025	2.070.348,00	2025
14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Pengembalian Dana atas Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang dengan no transaksi bank non no PG11121954398473 - RETUR 240925	PT KARYA IHSAN SEJAHTERA	027/ /BAPENDA /VIII/2025	2.624.440,00	2025
15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Pengembalian Dana atas Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang dengan no transaksi bank no PG11142854399344 - RETUR 240925	PT KARYA IHSAN SEJAHTERA	027/ /BAPENDA /VIII/2025	3.908.240,00	2025
16	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Pengembalian Dana atas Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang dengan no transaksi bank no PG11130554398876 - RETUR 240925	PT KARYA IHSAN SEJAHTERA	027/ /BAPENDA /VIII/2025	3.173.240,00	2025
							JUMLAH	**545.013.558,00**	

B. UTANG BELANJA MODAL PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Pembayaran Belanja Modal Personal Computer (PC Unit)	PT. MULTI MITRA GUNA	EP-01KAFWW8C3DYED372A34NCCP2B	136.132.000,00	2025
2	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Printer)	PT. MULTI MITRA GUNA	EP-01KBP3WV67KEQH90A01ZNGH5E1	72.840.000,00	2025
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Printer Pusat)	CV. PEFORMA TEKNOLOGI NUSANTARA	EP-01K9RY2D9EG48GMQMMTY0ZB0TV	28.620.000,00	2025
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Pembayaran Belanja Modal Personal Computer	PT. DHARMA MULTI KARYA	EP-01KBH6SQ7CKVBRVXVNSE9BCJNG	91.150.000,00	2025
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Pembayaran Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Rak Besi)	SE KONG	EP-01K8PW2FM3K18J28XYVE6GMRE6	106.500.000,00	2025
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Pembayaran Belanja Modal Personal Computer (PC Unit Tanjung Batu dan Bintan)	CV. PEFORMA TEKNOLOGI NUSANTARA	EP-01KAAMEK93DS6P20Q3E74VQFM5	53.316.630,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Pembayaran Belanja Modal Komputer Unit Lainnya (Laptop Batam)	CV. PEFORMA TEKNOLOGI NUSANTARA	EP-01KBC45DM2FFP5Q21G9QXCD4K6	37.700.000,00	2025
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Pembayaran Belanja Modal Personal Computer (Tablet PC Pusat)	SINERGI BATAM JAYA PT	EP-01KA892330BDSWN04Z05H0TVS3	25.800.000,00	2025
							JUMLAH	**552.058.630,00**	

LAMPIRAN 9-AB

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	-
2	Penambahan Utang 2025	519.709.213,00
	Total Utang Belanja	**519.709.213,00**

A. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA BADAN PENGHUBUNG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Belanja Natura dan Pakan-Natura	CV ABDI DAYA KANCORE	EP-01K9BRT1H1QR4NDGTPSYE68KCH	9.290.700,00	2025
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Perbaikan Kebocoran Dinding dan Lainnya)	PT. PUTRA ARKANA TRIYASA	PO-147308-251114-1	32.743.050,00	2025
3	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	PT. JULISTIA KARTA JAYA	EP-01K9C0YK9PPETZ930E6M6V4H30	12.737.250,00	2025
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	PT. YADA WASISTA SENTOSA	EP-01K8AW608ZSMAEQXMMWFMT0YMC	17.848.800,00	2025
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	Belanja Pakaian Jas/Safari - Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) S	PT. YADA WASISTA SENTOSA	EP-01K8AX9QPXWEXBX9C8A4JCS3Z3	15.984.000,00	2025
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya (Pemeliharaan Rutin Lift)	CV. SURYA MITRA ABADI	EP-01KAV55JZ94BQ89JFHECQXJ7AN	11.809.996,00	2025
7	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	PT. ASHTREE BOGA NUSANTARA	EP-01K83JDM40JN870T3EN34B10RH	73.920.000,00	2025
8	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	PT. JULISTIA KARTA JAYA	EP-01KAX6E9GSQ9ZWRE2YE4DG28T2	41.400.000,00	2025
9	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Belanja Natura dan Pakan-Natura	CV ABDI DAYA KANCORE	EP-01KAX5YQDYGBZRVZ55SMX4D82H	16.479.984,00	2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	PT. JULISTIA KARTA JAYA	EP-01KAX8X7QMA0Q8NFY5HHFM9KTJ	20.000.000,00	2025
11	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	PT. JULISTIA KARTA JAYA	EP-01KAX5GSQHCG19C0WNSDV36JM3	12.449.693,00	2025
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Air Conditioner Smartcool Monitoring (ACSM) di Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Jakarta	PT. QUANTA TEKNIK GEMILANG	EP-01JYZP645MXE8668DTCWTCYC5	55.888.500,00	2025
13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Bulan Desember 2025	PT. MEDIANUSA PERMANA	0009/08.0002/PPK-BANHUB/SP/2025	25.000.000,00	2025
14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	PT. BINA RIZKI BERSAMA	0394/09.0002/PPK-BANHUB/SPK/2025	22.615.140,00	2025
15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	PT. BINA RIZKI BERSAMA	0393/09.0002/PPK-BANHUB/SPK/2025	59.801.250,00	2025
16	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (Tari Melayu untuk Acara Soul Of Youth TMII Tanggal 16 November 2025)	SUKSES GEMILANG	PO-147308-251113-4	15.356.850,00	2025
17	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	PT. ASHTREE BOGA NUSANTARA	EP-01K83JDM40JN870T3EN34B10RH	76.384.000,00	2025
							JUMLAH	**519.709.213,00**	

LAMPIRAN 9-AC

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	-
2	Penambahan Utang 2025	83.400.001,00
	Total Utang Belanja	**83.400.001,00**

A. UTANG BELANJA MODAL PADA INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Belanja Modal Personal Computer (Laptop)	CV. SINAR MANDIRI	EP-01KAWZNQ4MBA1VYFSA0X59YMFV	83.400.001,00	2025
							JUMLAH	**83.400.001,00**	

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Kewajiban Tahun 2024	-
2	Penambahan Utang 2025	2.311.640.001,00
	Total Utang Belanja	**2.311.640.001,00**

A. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Sewa Billboard/Papan Reklame)	CV. SINAR FAJRI	EP-01K98T6EV964FBXDGTJZ08TDW4	137.340.000,00	2025
2	Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Belanja Publikasi Podcast/Siaran Langsung))	PT. TRIBUN MEDIA GRAFIKA	EP-01K9VBMV16NGKJQ4TD2DNXQNG01	40.000.000,00	2025
3	Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Belanja Publikasi Podcast/Siaran Langsung))	PT. TRIBUN MEDIA GRAFIKA	EP-01K9P8T0R2RD35GRF30B7MD5W2	20.000.000,00	2025
4	Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Belanja Publikasi Podcast/Siaran Langsung))	PT. TRIBUN MEDIA GRAFIKA	EP-01K8J3KKT7MQKXC3TS703GPKBG	20.000.000,00	2025
5	Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0055	elanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Belanja Publikasi Podcast/Siaran Langsung)	PT. TRIBUN MEDIA GRAFIKA	EP-01KBPATAHKGT5DYGQ16WM55WQ5	20.000.000,00	2025
6	Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Belanja Publikasi Podcast/Siaran Langsung)	PT. TRIBUN MEDIA GRAFIKA	EP-01KBY3XY6M8XTVEQN3ETM3XR1Y	20.000.000,00	2025
							JUMLAH	**257.340.000,00**	

B. UTANG BELANJA BARANG DAN JASA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat (VIDEOTRON + Pemasangan)	PT.ALKA GADA TAMA	EP-01K9VEVDSFEWJC1BB9SX4RPG5H	238.000.000,00	2025
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat (Lampu Jalan PJU Solar Cell Tenaga Surya + Pemasangan)	PT. MEGA ALWATHON SEJAHTERA	EP-01K9TT00025EAHSFB05Q47KRY4	539.992.800,00	2025
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat (Televisi dan CCTV)	PT. BIAS SURYA TEKNOLOGI	EP-01KAFYPD790YKTDDH51WERMYED	102.472.883,00	2025
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat (Kendaraan Roda Empat)	PT. AGUNG AUTOMALL	EP-01K85A3N25Y2PGQH766N3JY84W	1.092.234.317,00	2025
							JUMLAH	**1.972.700.000,00**	

C. UTANG BELANJA MODAL PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING BELANJA	URAIAN REKENING BELANJA	URAIAN BELANJA	PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	NILAI UTANG	TAHUN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Belanja Modal Personal Computer (Laptop dan PC Unit)	CV. LOGIN KOMPUTINDO	EP-01K96J3W6DD2AFYZY7PFH7TT3X	81.600.001,00	2025
							JUMLAH	**81.600.001,00**	

LAMPIRAN 9-AE

UTANG BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

NO	KAB/KOTA	PKB	BBN-KB	AIR PERMUKAAN	PBB-KB	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Kota Batam	2.476.652.998,00	1.551.243.580,00	3.626.269.490,00	23.646.070.247,00	31.300.236.315,00
2	Kota Tanjung Pinang	519.164.274,00	251.330.380,00	-448.702.649,00	6.127.564.509,00	6.449.356.514,00
3	Kab. Bintan	395.732.700,00	249.301.928,00	-633.292.717,00	5.018.371.517,00	5.030.113.428,00
4	Kab. Karimun	486.838.561,00	220.510.478,00	16.512.207,00	5.052.209.987,00	5.776.071.233,00
5	Kab. Natuna	356.608.449,00	225.437.528,00	18.556.191,00	4.042.674.194,00	4.643.276.362,00
6	Kab. Lingga	346.976.854,00	208.297.178,00	48.711.809,00	3.168.618.088,00	3.772.603.929,00
7	Kab. Kep. Anambas	352.187.531,00	210.039.429,00	192.094.835,00	2.972.895.921,00	3.727.217.716,00
	TOTAL	**4.934.161.367,00**	**2.916.160.501,00**	**2.820.149.166,00**	**50.028.404.463,00**	**60.698.875.497,00**

LAMPIRAN 9-AF

UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KEGIATAN	SALDO AWAL	PENYESUAIAN SALDO AWAL	PELUNASAN	SALDO AKHIR
1	2	4	5	6	7 = 5 - 6
1	Utang Lebih Bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	1.702.100.196,50	1.054.320.894,87	81.797.436,00	2.674.623.655,37
	JUMLAH	**1.702.100.196,50**	**1.054.320.894,87**	**81.797.436,00**	**2.674.623.655,37**

Tahun	Saldo Awal	Penyesuaian Saldo Awal	Pelunasan	Saldo Akhir
2013	10.816.152.163,13	0,00	0,00	10.816.152.163,13
2021	10.816.152.163,13	0,00	2.359.661.339,63	8.456.490.823,50
2022	8.456.490.823,50	0,00	1.741.910.548,00	6.714.580.275,50
2023	6.714.580.275,50	0,00	372.428.197,50	6.342.152.078,00
2024	6.342.152.078,00	0,00	4.640.051.881,50	1.702.100.196,50
2025	1.702.100.196,50	1.054.320.894,87	81.797.436,00	2.674.623.655,37

UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Utang kurang catat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Menengah (Dikmen) Tahun 2017

KURANG SALUR TRIWULAN IV TAHUN 2016 JENJANG PENDIDIKAN SMA &SMK

NO	KABUPATEN/KOTA	SMA			SMK			JUMLAH		
		SEKOLAH	SISWA	DANA	SEKOLAH	SISWA	DANA	SEKOLAH	SISWA	DANA
1	Kota Batam	36	2.530	Rp 885.500.000	13	2.750	Rp 962.500.000	49	5.280	Rp 1.848.000.000
2	Kota Tanjungpinang	10	765	Rp 267.750.000	4	732	Rp 256.200.000	14	1.497	Rp 523.950.000
3	Kabupaten Bintan	9	554	Rp 193.900.000	2	300	Rp 105.000.000	11	854	Rp 298.900.000
4	Kabupaten Karimun	17	1.316	Rp 460.600.000	3	400	Rp 140.000.000	20	1.716	Rp 600.600.000
5	Kabupaten Lingga	11	462	Rp 161.700.000		-		11	462	Rp 161.700.000
6	Kabupaten Natuna	14	425	Rp 148.750.000		-		14	425	Rp 148.750.000
7	Kabupaten Kep. Anambas	5	220	Rp 77.000.000		-		5	220	Rp 77.000.000
TOTAL		102	6.272	2.195.200.000	22	4.182	1.463.700.000	124	10.454	3.658.900.000

PENYALURAN DI 2017 UNTUK BOS KURANG SALUR TAHUN 2016 JENJANG PENDIDIKAN SMA & SMK

NO	KABUPATEN/KOTA	SMA			SMK			JUMLAH		
		SEKOLAH	SISWA	DANA	SEKOLAH	SISWA	DANA	SEKOLAH	SISWA	DANA
1	Kota Batam	36	1.186	Rp 415.100.000	7	1.350	Rp 472.500.000	43	2.536	Rp 887.600.000
2	Kota Tanjungpinang	10	365	Rp 127.750.000	4	535	Rp 187.250.000	14	900	Rp 315.000.000
3	Kabupaten Bintan	9	273	Rp 95.550.000	2	160	Rp 56.000.000	11	433	Rp 151.550.000
4	Kabupaten Karimun	17	634	Rp 221.900.000	3	240	Rp 84.000.000	20	874	Rp 305.900.000
5	Kabupaten Lingga	11	272	Rp 95.200.000	-	-		11	272	Rp 95.200.000
6	Kabupaten Natuna	14	293	Rp 102.550.000	-	-		14	293	Rp 102.550.000
7	Kabupaten Kep. Anambas	5	105	Rp 36.750.000	-	-		5	105	Rp 36.750.000
TOTAL		102	3.128	1.094.800.000	16	2.285	799.750.000	118	5.413	1.894.550.000

BOS KURANG SALUR TAHUN 2016 JENJANG PENDIDIKAN SMA & SMK

NO	KABUPATEN/KOTA	SMA			SMK			JUMLAH		
		SEKOLAH	SISWA	DANA	SEKOLAH	SISWA	DANA	SEKOLAH	SISWA	DANA
1	Kota Batam	24	1.344	Rp 470.400.000	13	1.400	Rp 490.000.000	37	2.744	Rp 960.400.000
2	Kota Tanjungpinang	7	400	Rp 140.000.000	4	197	Rp 68.950.000	11	597	Rp 208.950.000
3	Kabupaten Bintan	7	281	Rp 98.350.000	1	140	Rp 49.000.000	8	421	Rp 147.350.000
4	Kabupaten Karimun	12	682	Rp 238.700.000	3	160	Rp 56.000.000	15	842	Rp 294.700.000
5	Kabupaten Lingga	5	190	Rp 66.500.000	-	-	Rp -	5	190	Rp 66.500.000
6	Kabupaten Natuna	3	132	Rp 46.200.000	-	-	Rp -	3	132	Rp 46.200.000
7	Kabupaten Kep. Anambas	4	115	Rp 40.250.000	-	-	Rp -	4	115	Rp 40.250.000
TOTAL		62	3.144	1.100.400.000	21	1.897	663.950.000	83	5.041	1.764.350.000

Jl. D.I Panjaitan Komplek Ruko Bintan Center Blok C 12, Kelurahan Air Raja,
Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. 29122
0771 - 4448574
info@pelabuhankepri.co.id
marketing@pelabuhankepri.co.id
www.pelabuhankepri.co.id

PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda)

PT. PELABUHAN KEPRI (PERSERODA)
LAPORAN NERACA
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025

	2025		2025
ASET		**KEWAJIBAN DAN EKUITAS**	
Aset Lancar		**Kewajiban Lancar**	
Kas dan Setara Kas	13.675.425.721	Hutang usaha	1.864.444.025
Piutang Usaha - PT. Prima Buana Indah	120.000.000	Hutang Pajak Penghasilan	47.113.231
Piutang Usaha - Labuh Jangkar Kabil	32.300.000	PPN Keluaran	109.556.995
Piutang Usaha - TKBM Pel. Kuala Riau	10.000.000	**Jumlah Kewajiban Lancar**	2.021.114.251
Piutang Usaha - Pemanduan dan Penundaan	2.763.068.985		
Piutang Lain - lain		**Kewajiban Tidak Lancar**	
Piutang Berelasi	-	Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	154.003.715
Piutang Pihak Ketiga	20.000.000	Kewajiban jangka panjang	500.000.000
Cadangan piutang tak tertagih	(20.000.000)	**Jumlah Kewajiban Tidak Lancar**	**654.003.715**
Pajak Dibayar Dimuka	170.992.054		
PPN masukan	113.436.821		
Aset Lancar	**16.885.223.581**		
Aset Tetap			
Peralatan	1.560.437.673	**JUMLAH KEWAJIBAN**	**2.675.117.966**
Akum. Peny. Peralatan	(946.819.724)		
Kapal MV. Lintas Kepri	23.303.490.000	**EKUITAS**	
Akum. Peny. Kapal MV. Lintas Kepri	(5.534.578.875)		
Aset Tidak Lancar	**18.382.529.074**	**Penyertaan Modal dari Pemprov Kepri**	25.000.000.000
		Pemprov Kepri (Kapal MV. Lintas Kepri)	23.303.490.000
		Koperasi Amanah Tuah Bintan	25.000.000
Aset Lainnya		**Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu**	(13.167.446.480)
Aset tak berwujud	1.701.282.000	**Laba (Rugi) Berjalan**	
Akumulasi Amortisasi	(374.451.000)	Laba Rugi Tahun Berjalan	(1.255.452.195)
		Koreksi Laba Rugi Tahun Berjalan	13.874.364
Aset Lainnya	**1.326.831.000**		
		JUMLAH EKUITAS	**33.919.465.689**
JUMLAH ASET	**36.594.583.655**	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS**	**36.594.583.655**

Tanjungpinang, 31 Desember 2025
PT. PELABUHAN KEPRI (PERSERODA)
DIREKTUR

Capt. AWALUDDIN, M.Mar

Jl. D.I Panjaitan Komplek Ruko Bintan Center Blok C12, Kelurahan Air Raja,
Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, 29122
0771 - 4448574
info@pelabuhankepri.co.id
marketing@pelabuhankepri.co.id
www.pelabuhankepri.co.id

PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda)

PT. PELABUHAN KEPRI (PERSERODA)
LAPORAN LABA/(RUGI)
Per 31 Desember 2025

PENDAPATAN USAHA				
1	Pendapatan atas kerjasama Pengelolaan kapal MV. Untas Kepri trayek Tanjungpinang - Batam - Lingga	1.372.762.080		
2	Pendapatan usaha Lebuh Jangkar Tanjung Berakit (jasa terkait kepelabuhanan)	29.218.135		
3	Pendapatan atas pengelolaan pelantar 2 (dua)	200.701.537		
4	Pendapatan atas Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Mocoh	53.270.768		
5	Pendapatan usaha Lebuh Jangkar Kabil Selat Riau (jasa terkait kepelabuhanan)	2.730.424.151		
6	Pendapatan pelabuhan kota negara	1.359.792.276	+	
	JUMLAH PENDAPATAN			**6.746.169.657**
HPP				
1	Kegiatan kerjasama Pengelolaan Kapal MV. Untas Kepri trayek Tanjungpinang - Batam - Lingga	-		
2	Kegiatan usaha Pengelolaan Kawasan Lebuh Jangkar di Tanjung berakit	-		
3	Kegiatan pengelolaan pelabuhan pelantar 2	-		
4	Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Mocoh	-		
5	Kegiatan usaha Pengelolaan Kawasan Lebuh Jangkar di Kabil Selat Riau	1.739.159.198		
6	Kegiatan pengelolaan pelabuhan kota negara	976.977.220	+	
				2.716.136.418
BEBAN USAHA				
1	Kegiatan kerjasama Pengelolaan Kapal MV. Untas Kepri trayek Tanjungpinang - Batam - Lingga	50.000.000		
2	Kegiatan usaha Pengelolaan Kawasan Lebuh Jangkar di Tanjung berakit	6.000.000		
3	Kegiatan pengelolaan pelabuhan pelantar 2	351.846.835		
4	Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Mocoh	-		
5	Kegiatan usaha Pengelolaan Kawasan Lebuh Jangkar di Kabil Selat Riau	21.819.800		
6	Kegiatan pengelolaan pelabuhan kota negara	194.690.991	+	
	JUMLAH BEBAN USAHA			**624.305.626** -
	LABA/ (RUGI) USAHA			**2.405.667.613**
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI				
1	Beban Pegawai dan Komisaris	1.719.931.339		
2	Beban Bahan	235.497.166		
3	Beban Pemeliharaan	3.092.500		
4	Beban penyusutan dan amortisasi	1.348.821.780		
5	Beban Sewa	92.501.900		
6	Beban Administrasi	328.456.544		
7	Beban Umum	265.748.094		
	JUMLAH BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI			**3.994.045.896** -
	LABA/(RUGI) KOTOR			**(1.588.378.283)**
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN - LAIN				
1	Pendapatan Lain-Lain	**432.883.788**		
	a Pendapatan Bunga Bank dan Bunga Deposito Bank	430.356.060		
	b Penerimaan - Pengembalian belanja SPPD atas LHP Inspektorat tahun 2024	1.500.000		
	c Penerimaan - lain-lain	227.728		
2	Beban Administrasi Bank	87.061.206	-	
3	Beban Bunga Pembiayaan	12.076.390		
	JUMLAH PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			**332.926.188** +
	LABA/ (RUGI) BERSIH			**(1.255.452.195)**

NO	URAIAN	PENDAPATAN	HPP	BEBAN		SELISIH
KEGIATAN USAHA						
1	Pendapatan atas kerjasama Pengelolaan kapal MV. Lintas Kepri trayek Tanjungpinang - Batam - Uniga	1.372.762.688		50.000.000		1.322.762.688
2	Pendapatan usaha Labuh Jangkar Tanjung Berakit (jasa terkait kepelabuhanan)	29.218.135		6.000.000		23.218.135
3	Pendapatan atas pengelolaan pelabuhan 2 (dua)	200.701.537		351.846.836	-	151.145.299
4	Pendapatan atas Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Moco'h	53.270.708		-		53.270.708
5	Pendapatan usaha Labuh Jangkar Kabil Belat Riau (jasa terkait kepelabuhanan)	2.730.424.151	1.738.159.198	21.819.800		969.945.153
6	Pendapatan pelabuhan kota segara	1.359.792.278	978.077.220	194.896.091		187.818.967
	JUMLAH PENDAPATAN DAN BEBAN KEGIATAN USAHA	**6.746.169.667**	**2.716.136.418**	**624.366.826**		**2.406.667.513**
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI						
a	Pengadaan Alat Pegawai & Tunjangan			1.719.931.339		
b	Tunjangan Hari Raya			-		
1	**Beban Pegawai**			**1.719.931.339**		
a	Beban BBM Kendaraan			34.157.000		
b	Beban Makan			156.539.500		
c	Beban bahan Air			832.560		
d	Beban Bahan Listrik			25.056.136		
e	Beban Bahan Wifi dan Indihome			16.812.000		
f	Beban Lainnya			-	+	
2	**Beban Bahan**			**235.497.196**		
a	Beban renovasi gedung			-		
b	Beban Pemeliharaan			3.092.500	+	
3	**Beban Pemeliharaan**			**3.092.500**		
a	Beban penyusutan dan investasi kantor			148.011.480		
b	Beban penyusutan kapal MV. Lintas Kepri			1.165.174.500		
c	Beban Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud			34.735.800	+	
4	**Beban penyusutan dan amortisasi**			**1.348.921.780**		
a	Sewa Kantor			27.819.000		
b	Sewa Gedung			-		
c	Sewa Kendaraan			64.682.500	+	
5	**Beban Sewa**			**92.501.500**		
a	Cetak dan Penggandaan			1.883.000		
b	Alat tulis kantor			18.114.050		
c	Pengiriman surat			1.733.500		
d	Jamuan Rapat			15.407.109		
e	Rumah tangga			28.345.900		
f	Beban Jasa Legalitas Perusahaan			262.971.985	+	
6	**Beban Administrasi**			**328.455.544**		
a	Perjalanan Dinas			257.733.237		
b	Pengembangan Sumber Daya Manusia			3.050.000		
c	Peningkatan Sistem Manajemen			4.162.797	+	
7	**Beban Umum**			**265.746.034**		
	JUMLAH BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	**-**	**-**	**3.994.045.896**		**-**
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN - LAIN						
1	Pendapatan Lain-Lain					
a	Pendapatan Bunga Bank dan Bunga Deposito	430.356.060		-		430.356.060
b	Penerimaan - Pengembalian belanja SPPD atas LHP Inspektorat tahun 2024	1.500.000		-		1.500.000
c	Penerimaan - lain-lain	227.728				227.728
2	**Beban Administrasi Bank**			87.081.208	-	87.081.208
3	**Beban bank Pembiayaan**			12.076.390	-	12.076.390
	JUMLAH PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN - LAIN	**432.083.788**	**-**	**99.157.598**		**332.926.190**
	LABA/ (RUGI) BERSIH	**6.178.263.343**	**2.716.136.418**	**4.717.569.120**	-	**1.265.452.196**

Jl. D.I Panjaitan Komplek Ruko Bintan Center Blok C12, Kelurahan Air Raja,
Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. 29122
0771 - 4448574
info@pelabuhankepri.co.id
marketing@pelabuhankepri.co.id
www.pelabuhankepri.co.id

PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda)

PT. PELABUHAN KEPRI (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Pendapatan usaha	5.746.169.557
Pendapatan non Usaha (bunga bank dan bunga deposito)	432.083.786
Jumlah Pendapatan	6.178.253.343
HPP (Beban Pokok Pendapatan)	2.717.226.418
Beban usaha	4.618.411.522
Beban non usaha	99.157.598
Jumlah Beban	7.434.795.538
Laba / (rugi) berjalan	(1.256.542.195)
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba tahun berjalan menjadi arus kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi:	
Penyusutan aset tetap	1.348.821.780
Penyesuaian saldo laba	14.966.865
Pajak dibayar dimuka	(89.939.616)
PPN masukan yang dapat dikreditkan	(113.436.821)
Penyesuaian atas mutasi saldo laporan neraca	
Piutang usaha pihak ketiga	(2.950.678.260)
Pendapatan yang masih harus diterima	(2.388.084.106)
Pendapatan yang ditangguhkan	
Beban yang masih harus dibayar	4.404.476.058
Kewajiban jangka panjang	
Utang Pajak	-
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(1.030.416.295)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Penambahan aset tetap	(42.665.500)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(42.665.500)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Penambahan ekuitas lainnya	
Kas bersih digunakan untuk aktivitas Pendanaan	-
PENURUNAN BERSIH KAS DAN BANK	(1.073.081.795)
KAS DAN BANK AWAL	14.748.507.516
KAS DAN BANK AKHIR	**13.675.425.721**

Jl. D.I Panjaitan Komplek Ruko Bintan Center Blok C 12, Kelurahan Air Raja,
Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, 29122
0771 - 4448574
info@pelabuhankepri.co.id
marketing@pelabuhankepri.co.id
www.pelabuhankepri.co.id

PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda)

PT. PELABUHAN KEPRI (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025

URAIAN	Modal Disetor	Tambahan Modal Disetor	Ekuitas Lainnya	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah Ekuitas
saldo per 1 Nopember 2014	25.000.000.000	-	-	-	25.000.000.000
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	1.358.129.538	976.484.500	(467.795.905)	(467.795.905)
Saldo per 31 Desember 2014	25.000.000.000	-	-	(467.795.905)	24.532.204.095
Koreksi Saldo Awal atas Modal	25.000.000	-	-	910.644	25.910.644
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	(1.419.790.360)	(1.419.790.360)
Saldo per 31 Desember 2015	25.025.000.000	-	-	(1.886.675.629)	23.138.324.371
Koreksi Saldo Awal atas Modal	-	-	-	94.086.108	94.086.108
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	(817.800.788)	(817.800.788)
Saldo per 31 Desember 2016	25.025.000.000	-	-	(2.610.390.309)	22.414.609.691
Koreksi Saldo Awal atas Modal	-	-	-	(12.037)	(12.037)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	(206.496.204)	(206.496.204)
Saldo per 31 Desember 2017	25.025.000.000	-	-	(2.816.898.550)	22.208.101.450
Koreksi Saldo Awal atas Modal	-	-	-	87.000.067	87.000.067
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	1.089.597.371	1.089.597.371
Saldo per 31 Desember 2018	25.025.000.000	-	-	(1.640.301.112)	23.384.698.888
Koreksi Saldo Awal atas Modal	-	-	-	282.012.312	282.012.312
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	1.970.802.783	1.970.802.783
Saldo per 31 Desember 2019	25.025.000.000	-	-	612.513.984	25.637.513.984
Koreksi Saldo Awal atas Modal	-	-	-	(38.210.045)	(38.210.045)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	(167.044.341)	(167.044.341)
Saldo per 31 Desember 2020	-	-	-	407.259.598	25.432.259.598
Koreksi Saldo Awal atas Modal	-	-	-	(1.016.000)	(1.016.000)
Penambahan ekuitas lainnya			23.303.490.000	-	23.303.490.000
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-		(2.003.044.962)	(2.003.044.962)
Saldo per 31 Desember 2021	-	-	23.303.490.000	(1.596.801.364)	46.731.688.636
Koreksi Saldo Awal atas Modal					
				(3.429.142.547)	(3.429.142.547)
				(4.354.163.036)	(4.354.163.036)
				(619.428.940)	(619.428.940)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-		
Saldo per 31 Desember 2022 (Un-audited)	-	-	-	(9.999.535.887)	38.328.954.113
Koreksi Saldo Awal atas Modal					
- Selisih kurs				73.095.486	73.095.486
- Koreksi atas aset				58.470.000	58.470.000
Koreksi atas penyusutan aset				(37.769.334)	(37.769.334)
Saldo per 31 Desember 2022 (audited)				(9.905.739.735)	38.422.750.265
Laba (rugi) Tahun Berjalan				(2.126.287.281)	(2.126.287.281)
Koreksi Saldo Awal atas Modal				4.228.215	4.228.215
Saldo per 31 Desember 2023 (audited)				(12.027.798.801)	36.300.691.199
Laba (rugi) tahun berjalan	-	-	-	(1.140.215.499)	(1.140.215.499)
Koreksi laba(rugi) Tahun Berjalan				567.820	567.820
Saldo per 31 Desember 2024 (audited)	-	-	-	(13.167.446.480)	35.161.043.520
Laba (rugi) Tahun Berjalan				(1.255.452.195)	(1.255.452.195)
Koreksi laba(rugi) Tahun Berjalan				13.874.364	13.874.364
Saldo per 30 November 2025				(14.409.024.311)	33.919.465.689

PT PELABUHAN KEPRI (PERSERODA)

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
DAN
LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

PT PELABUHAN KEPRI (PERSERODA)
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
DAN
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Direksi .....

Laporan Auditor Independen ..... i - iii

Laporan Keuangan

Neraca ..... 1 - 2
Laporan Laba Rugi 3
Laporan Perubahan Ekuitas 4
Laporan Arus Kas 5
Catatan Atas Laporan Keuangan ..... 6 - 16

Jl. D.I Panjaitan Komplek Ruko Bintan Center Blok C12, Kelurahan Air Raja,
Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, 29122
0771 - 4448574
info@pelabuhankepri.co.id
marketing@pelabuhankepri.co.id
www.pelabuhankepri.co.id

PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda)

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
PT PELABUHAN KEPRI (PERSERODA)
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Capt. Awaluddin, M.Mar
Alamat kantor	:	Jl. D.I Panjaitan Komplek Ruko Bintan Center Blok C12, Kel. Air Raja, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang
Nomor telepon	:	0812-6191-2977
Jabatan	:	Direktur

Menyatakan:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan;
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tanjungpinang, 12 Maret 2025

Capt. Awaluddin, M.Mar
Direktur

Alex Belvin & Rekan
Registered Public Accountants, License Number : 627/KM.1/2022

Jalan Kenanga 26 A, Duren Sawit, Jakarta, Indonesia
Tel: +62 21 29192917, +62 8122880031
Email: admin@abrekan.com
www.abrekan.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00019/2.1379/AU.2/06/1811-1/1/III/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Pelabuhan Kepri (Perseroda)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Pelabuhan Kepri (Perseroda) ("Perusahaan"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini dengan modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 16 Juli 2024.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit.

Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

ALEX BELVIN & REKAN



Alex Belvin M. Sihombing
SE, Ak, M.Ak, CA, CPA, ASEAN CPA, CFrA, CFI, CPFI

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1811



12 Maret 2025

PT PELABUHAN KEPRI (PERSERODA)

NERACA

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2.b, 3, 16	14.748.507.516	14.468.391.785
Piutang usaha	2.e, 4	25.200.000	-
Piutang lain-lain	2.e, 4	-	20.000.000
Pajak dibayar di muka	5.a	61.730.358	-
Jumlah aset lancar		14.835.437.874	14.468.391.785
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap, bersih	2.f, 6	19.653.949.554	20.428.282.664
Aset takberwujud	7	1.361.566.800	1.396.302.600
Jumlah aset tidak lancar		21.015.516.354	21.824.585.264
JUMLAH ASET		**35.850.954.228**	**36.312.977.049**

Tanjungpinang, 12 Maret 2025

Disusun oleh,

Diddyk Triesna Murti, S.Tr

Deputi Administrasi, Operasional dan Keuangan

Disetujui oleh,

PT. PELABUHAN KEPRI (PERSERODA) DIREKTUR

Capt. Awaluddin, M.Mar

Direktur

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT PELABUHAN KEPRI (PERSERODA)

NERACA

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang usaha	2.g, 8	35.906.993	12.285.850
Jumlah kewajiban jangka pendek		35.906.993	12.285.850
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Kewajiban imbalan pascakerja	2.h, 10	154.003.715	-
Utang bank	9	500.000.000	-
Jumlah kewajiban jangka panjang		654.003.715	-
JUMLAH KEWAJIBAN		**689.910.708**	**12.285.850**
EKUITAS			
Modal saham	11	48.328.490.000	48.328.490.000
Saldo defisit		(13.167.446.480)	(12.027.798.801)
JUMLAH EKUITAS		**35.161.043.520**	**36.300.691.199**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**35.850.954.228**	**36.312.977.049**

Tanjungpinang, 12 Maret 2025

Disusun oleh,

Diddyk Triesna Murti, S.Tr

Deputi Administrasi, Operasional dan Keuangan

Disetujui oleh,

PT. PELABUHAN KEPRI (PERSERODA) DIREKTUR

Capt. Awaluddin, M.Mar

Direktur

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT PELABUHAN KEPRI (PERSERODA)
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN	2.i, 12	3.030.843.838	2.497.859.420
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2.i, 13	1.678.224.559	2.315.060.327
LABA KOTOR		**1.352.619.279**	**182.799.093**
BEBAN USAHA			
Beban administrasi dan umum	2.i, 14	2.777.417.310	2.641.159.133
Jumlah beban usaha		2.777.417.310	2.641.159.133
RUGI USAHA		**(1.424.798.031)**	**(2.458.360.040)**
PENDAPATAN / (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan lain-lain	2.i, 15	359.655.833	352.297.835
Beban lain-lain		(75.073.301)	(20.225.076)
Pendapatan lain-lain, bersih		284.582.532	332.072.759
RUGI SEBELUM PAJAK		**(1.140.215.499)**	**(2.126.287.281)**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	5.b	-	-
RUGI BERSIH SETELAH PAJAK		**(1.140.215.499)**	**(2.126.287.281)**

Tanjungpinang, 12 Maret 2025

Disusun oleh,

Diddyk Triesna Murti, S.Tr
Deputi Administrasi, Operasional dan Keuangan

Disetujui oleh,

PT. PELABUHAN KEPRI (PERSERODA) DIREKTUR

Capt. Awaluddin, M.Mar
Direktur

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT PELABUHAN KEPRI (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Disetor	Saldo Defisit	Jumlah Ekuitas
Saldo 1 Januari 2023	48.328.490.000	(9.905.739.735)	**38.422.750.265**
Koreksi / (penyesuaian)		4.228.215	4.228.215
Rugi bersih setelah pajak	-	(2.126.287.281)	(2.126.287.281)
Saldo 31 Desember 2023	**48.328.490.000**	**(12.027.798.801)**	**36.300.691.199**
Koreksi / (penyesuaian)	-	567.820	567.820
Rugi bersih setelah pajak	-	(1.140.215.499)	(1.140.215.499)
Saldo 31 Desember 2024	**48.328.490.000**	**(13.167.446.480)**	**35.161.043.520**

PT PELABUHAN KEPRI (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Rugi bersih setelah pajak		(1.140.215.499)	(2.126.287.281)
Penyusutan aset tetap		1.284.005.008	1.248.312.261
Koreksi penyusutan aset tetap tahun sebelumnya			4.228.215
Koreksi laba ditahan tahun sebelumnya		567.820	-
Perubahan modal kerja:			
Piutang usaha	2.e, 4	(25.200.000)	-
Piutang lain-lain	2.e, 4	20.000.000	121.000.000
Pajak dibayar di muka	5.a	(61.730.358)	-
Aset takberwujud	7	34.735.800	50.735.300
Utang usaha	2.g, 8	23.621.143	4.514.893
Kewajiban imbalan pascakerja	2.h, 10	154.003.715	-
Kas bersih yang diperoleh dari / (digunakan untuk) aktivitas operasi		**289.787.629**	**(697.496.612)**
ARUS KAS DARI INVESTASI			
Perolehan aset tetap	2.f, 6	(509.671.898)	(171.478.000)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		**(509.671.898)**	**(171.478.000)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Utang bank	9	500.000.000	-
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan		**500.000.000**	**-**
Kenaikan / (penurunan) bersih kas dan setara kas		**280.115.731**	**(868.974.612)**
Kas dan setara kas awal tahun		14.468.391.785	15.337.366.397
Kas dan setara kas akhir tahun		**14.748.507.516**	**14.468.391.785**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Pelabuhan Kepri (Perusahaan) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2013 tentang pembentukan Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Kepri Tanggal 25 April 2013, yang diundangkan tanggal 1 Mei 2013, dan telah dimasukkan dalam Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Nomor 2. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pelabuhan Kepri No. 39 tanggal 29 November 2013 yang dibuat dihadapan Muslim, S.H Notaris di Tanjungpinang, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-04958.AH 01.01.Tahun 2014 tanggal 6 Februari 2014.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, perubahan terakhir dengan Akta No. 04 Tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Nana Fitriana, SH, M.Kn. Notaris di Bintan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0112874.AH.01.11.Tahun 2022.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi:

1) Jasa penunjang angkutan air;
2) Jasa pelayanan kepelabuhan laut;
3) Jasa pelayanan kepelabuhan sungai dan danau;
4) Jasa pelayanan kepelabuhan penyeberangan;
5) Jasa pelayanan kepelabuhan laut.

Perusahaan berdomisili di Jalan D.I Panjaitan Komplek Ruko Bintan Center Blok C.12, Air Raja, Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

b. Karyawan, Direksi dan Komisaris

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, susunan pengurus Perusahaan berdasarkan Akta No. 04 tanggal 13 Juni 2022 dari Nana Fitriana, SH, M.Kn notaris di Bintan, adalah sebagai berikut:

Komisaris	:	Tn. Azis Kasim Djou
Direktur	:	Tn. Awaluddin

Personel manajemen kunci Perusahaan terdiri dari Komisaris dan Direktur.
Jumlah rata-rata karyawan Perusahaan pada tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebanyak 26 dan 25.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Perusahaan memilih menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dengan pertimbangan bahwa informasi yang disajikan alam laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP masih mampu mencerminkan substansi ekonomi dari kegiatan operasi dan bisnis perusahaan. Pertimbangan lainnya adalah biaya dan manfaat dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP lebih efisien bagi perusahaan.

Dasar pengukuran laporan keuangan adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN - *LANJUTAN*

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan - *lanjutan*

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencangkup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai “kas dan deposito yang dibatasi penggunaannya".

c. Mata Uang Pelaporan, Transaksi, dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

Nilai tukar yang digunakan untuk penjabaran pos-pos moneter dalam mata uang asing didasarkan pada rata- rata kurs jual beli uang kertas asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, adalah sebesar Rp16.130 dan Rp15.416 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 per 1 Dolar Amerika Serikat (angka penuh dalam Rupiah).

d. Transaksi-transaksi Dengan Pihak-pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu sebagai transaksi hubungan istimewa sebagaimana diatur SAK ETAP Bab 28. “Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa”. Transaksi dan saldo perusahaan terhadap pihak hubungan entitas diungkapkan yang meliputi jumlah-jumlah transaksi, saldo termasuk syarat dan kondisi serta sifat pembayaran dan rincian jaminan yang diberikan atau diterima, penyisihan kerugian piutang tak tertagih terkait jumlah saldo piutang dan yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan piutang ragu-ragu yang jatuh tempo dari pihak hubungan istimewa.

Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika:

I. Secara langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut:
   a. Mengendalikan, dikendalikan oleh atau berada dibawah pengendalian bersama dengan entitas (termasuk entitas induk, entitas anak dan fellow subsidiaries).
   b. Memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas, atau
   c. Memiliki pengendalian bersama atas entitas.
II. Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas.
III. Pihak tersebut adalah *joint ventures* dimana entitas tersebut merupakan venture.
IV. Pihak tersebut adalah manajemen personil kunci entitas atau entitas induknya.
V. Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam (I) atau (IV).
VI. Pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh atau memiliki hak suara secara signifikan, secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam (VI) atau (V).
VII. Pihak tersebut adalah program imbalan pasca kerja untuk imbalan pasca kerja entitas atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

Perusahaan menetapkan bahwa personil manajemen kunci meliputi, Direksi dan Komisaris Perusahaan. Sedangkan anggota keluarga dekat meliputi, suami, istri, anak atau tanggungannya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN - *LANJUTAN*

e. Piutang dan Penyisihan Piutang

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan riviu individual masing-masing saldo piutang pada akhir tahun. Piutang usaha dibedakan menjadi piutang Pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan piutang pihak ketiga.

f. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAK ETAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap diakui dalam ekuitas dengan nama “Surplus Revaluasi Aset Tetap”.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laporan laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight line method*) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Tarif	Masa Manfaat
Kapal	5%	20 tahun
Bangunan	5%	20 tahun
Inventaris kantor	10% - 25%	4 - 10 tahun

Biaya-biaya tertentu sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan hak kepemilikan tanah ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang umur hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih dahulu.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya; pengeluaran setelah pengakuan awal suatu aset tetap yang memperpanjang umur manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset tetap tersebut. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya.

Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi pada tahun yang bersangkutan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

g. Utang Usaha

Utang usaha dinyatakan sebesar nilai nominal.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN - *LANJUTAN*

h. Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Perusahaan.

Perusahaan mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Perusahaan mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pada tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bab 23 tentang Imbalan Kerja sehubungan dengan Undang-undang tersebut di atas. Perusahaan belum menerapkan SAK ETAP tersebut dalam penyusunan laporan keuangan.

Perusahaan belum menerapkan SAK ETAP di atas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

i. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Penjualan diakui pada saat penyerahan jasa kepada pelanggan. Beban diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (*accrual basis*).

j. Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah terutang untuk periode tersebut, perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui adanya pajak tangguhan.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterima atau jika Perusahaan mengajukan keberatan pada saat keputusan tersebut ditetapkan.

k. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntan Publik (SAK ETAP) mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah estimasi semula.

3. KAS DAN SETARA KAS

	2024	2023
Kas tunai		
Kas	88.308.500	90.545.524
Sub jumlah	88.308.500	90.545.524
Bank		
Rupiah:		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4.937.617.309	3.004.074.166
PT Bank KB Bukopin Tbk	4.695.458.071	4.404.413.289
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	344.111.790	249.334.061
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	105.144.473	1.108.116.381
PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	50.258.846	585.130.808
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	1.090.000	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	1.000.000
Dollar Amerika Serikat:		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	26.518.527	25.777.556
Sub jumlah	10.160.199.016	9.377.846.261

	2024	2023
Deposito		
Rupiah:		
PT Bank KB Bukopin Tbk	3.000.000.000	2.500.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.500.000.000	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	2.500.000.000
Sub jumlah	4.500.000.000	5.000.000.000
Jumlah	**14.748.507.516**	**14.468.391.785**

4. PIUTANG

	2024	2023
Pihak ketiga:		
Piutang usaha	25.200.000	-
Piutang pegawai	20.000.000	20.000.000
Cadangan piutang tak tertagih	(20.000.000)	-
Jumlah	**25.200.000**	**20.000.000**

Seluruh piutang lain-lain didenominasikan dengan mata uang Rupiah.

Berdasarkan evaluasi terhadap status saldo piutang pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang usaha di atas akan dapat tertagih dalam satu tahun sejak tanggal neraca, sehingga tidak diperlukan penyisihan atas saldo piutang lain-lain tersebut. Penyisihan piutang dilakukan untuk piutang pegawai yang dianggap akan sulit tertagih seluruhnya.

5. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

Pajak dibayar di muka terdiri dari pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong pihak lain atas pendapataan bagi hasil pengoperasian kapal MV Kepri:

	2024	2023
Pajak penghasilan:		
Pasal 23	61.730.358	-
Jumlah	**61.730.358**	**-**

Seluruh pajak penghasilan dibayar di muka pasal 23 didenominasikan dengan mata uang Rupiah.

b. Beban pajak penghasilan

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan laba menurut laporan keuangan sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Rugi sebelum pajak :	(1.140.215.499)	(2.126.287.281)
Koreksi fiskal		
Beda waktu:		
Beban imbalan kerja	154.003.715	-
Sub jumlah	154.003.715	-
Rugi menurut fiskal tahun berjalan	(986.211.784)	(2.126.287.281)
Jumlah beban pajak penghasilan	**-**	**-**
Rugi fiskal tahun 2023	(2.126.287.281)	-
Rugi fiskal tahun 2022	(8.308.938.370)	(8.308.938.370)
Rugi fiskal tahun 2021	(2.003.044.962)	(2.003.044.962)
Rugi fiskal tahun 2020	(167.044.341)	(167.044.341)
Akumulasi rugi fiskal	**(13.591.526.738)**	**(12.605.314.954)**

Rugi fiskal dapat dikompensasikan dengan laba fiskal pada masa lima tahun mendatang sejak kerugian fiskal terjadi. Manajamen memperkirakan bahwa laba fiskal di masa mendatang tidak dapat dikompensasikan dengan kerugian fiskal sebesar Rp13.591.526.738 dan Rp12.605.314.954 masing- masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Oleh karena itu, Perusahaan tidak mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari kerugian fiskal sebesar Rp2.990.135.882 dan Rp2.773.169.290 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

6. ASET TETAP

	2024			
	Saldo Awal	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo Akhir**
Biaya perolehan				
Inventaris kantor	1.008.100.275	17.199.999	-	1.025.300.274
Kapal	23.303.490.000	-	-	23.303.490.000
Bangunan	-	492.471.899	-	492.471.899
Jumlah	**24.311.590.275**	**509.671.898**	**-**	**24.821.262.173**
Akumulasi penyusutan				
Inventaris kantor	(679.077.736)	118.830.508	-	(797.908.244)
Kapal	(3.204.229.875)	1.165.174.500	-	(4.369.404.375)
Jumlah	**(3.883.307.611)**	**1.284.005.008**	**-**	**(5.167.312.619)**
Nilai tercatat neto	**20.428.282.664**			**19.653.949.554**

	2023			
	Saldo Awal	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo Akhir**
Biaya perolehan				
Inventaris kantor	836.622.275	171.478.000	-	1.008.100.275
Kapal	23.303.490.000	-	-	23.303.490.000
Jumlah	**24.140.112.275**	**171.478.000**	**-**	**24.311.590.275**
Akumulasi penyusutan				
Inventaris kantor	(595.939.975)	83.137.761	-	(679.077.736)
Kapal MV	(2.039.055.375)	1.165.174.500	-	(3.204.229.875)
Jumlah	**(2.634.995.350)**	**1.248.312.261**	**-**	**(3.883.307.611)**
Nilai tercatat neto	**21.505.116.925**			**20.428.282.664**

Aset tetap kapal sebesar Rp 23.303.490.000 diperoleh Perusahaan melalui penyertaan modal barang milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Catatan 11). Aset tetap kapal telah dituangkan didalam akta No.04 tanggal 13 Juni 2022 dengan Nana Fitriana, SH., M.Kn. notaris di Bintan.

Beban penyusutan dan amortisasi dialokasikan sebagai berikut:

	2024	**2023**
Beban pokok pendapatan (Catatan 13)	1.165.174.500	1.165.174.500
Beban administrasi dan umum (Catatan 14)	118.830.509	99.137.261
Jumlah	**1.284.005.009**	**1.264.311.761**

7. ASET TAKBERWUJUD

	2024	**2023**
Aset takberwujud	1.701.282.000	1.701.282.000
Amortisasi	(339.715.200)	(304.979.400)
Jumlah	**1.361.566.800**	**1.396.302.600**

8. UTANG USAHA

	2024	2023
Pihak ketiga		
CV Melayu Betuah Berkah	14.228.552	-
CV Saputra Kembar	7.135.034	-
CV Bintan Harapan Wahana	-	9.570.850
PT Pijar Kepri Anugrah	-	2.500.000
Sub jumlah	21.363.586	12.070.850
Kerjasama mitra usaha		
Kerjasama mitra usaha - Pelabuhan Kota Segara	14.543.407	215.000
Sub jumlah	14.543.407	215.000
Jumlah	**35.906.993**	**12.285.850**

Seluruh utang usaha pihak ketiga didenominasikan dengan mata uang Rupiah.

9. UTANG BANK

	2024	2023
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	500.000.000	-
Jumlah	**500.000.000**	**-**

10. KEWAJIBAN IMBALAN PASCAKERJA

Pada tahun 2024 perusahaan melakukan pencatatan Kewajiban Imbalan pasca kerja sesuai dengan SAK ETAP Bab 23 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Perusahaan. Tahun-tahun sebelumnya perusahaan belum melakukan pencatatan kewajibat tersebut. Rincian berikut menjelaskan secara ringkas kewajiban imbalan pascakerja yang disajikan dalam neraca, perubahan kewajiban selama setahun, dan beban-beban yang diakui dalam laporan laba-rugi Perusahaan:

	2024	2023
Saldo awal	-	-
Penambahan	154.003.715	-
Pembayaran	-	-
Saldo akhir	154.003.715	-

Rincian berikut menjelaskan secara ringkas kewajiban imbalan pascakerja yang disajikan dalam laporan laba-rugi Perusahaan:

	2024	2023
Biaya jasa kini	154.003.715	-
Biaya bunga	-	-
Kerugian aktuaria diakui	-	-
Beban tahun berjalan	154.003.715	-

Beban imbalan pascakerja tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan dialokasikan ke dalam fungsi beban berdasarkan proporsi biaya tenaga kerja.

10. KEWAJIBAN IMBALAN PASCAKERJA - *LANJUTAN*

Perhitungan cadangan imbalan kerja untuk tahun 2024 dilakukan oleh manajemen, dengan menggunakan metode *projected unit credit* , dengan asumsi aktuarial pokok sebagai berikut:

	2024
Tingkat diskonto	7%
Tingkat gaji masa mendatang	5%
Usia pensiun normal	58 tahun
Tingkat kematian karyawan	TMI IV
Jumlah karyawan (satuan penuh)	8

11. MODAL SAHAM

Susunan kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sesuai akta No. 04 tanggal 13 Juni 2022 dari Nana Fitriana, SH, M.Kn notaris di Bintan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Nilai Nominal
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	4.830.349	99,95%	48.303.490.000
Koperasi Serba Usaha Amanah Tuah Bintan	2.500	0,05%	25.000.000
Jumlah	**4.832.849**	**100,00%**	**48.328.490.000**

Manajemen Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

12. PENDAPATAN BERSIH

	2024	2023
Pengelolaan kapal cepat MV Lintas Kepri	2.239.184.515	1.893.894.567
Pelabuhan Kota Segara	454.732.494	391.294.710
Labuh jangkar di perairan Selat Riau	218.523.045	128.559.000
Pengelolaan pelantar 2	118.403.784	50.385.303
Kerjasama jasa pelayanan kargo	-	33.725.840
Jumlah	**3.030.843.838**	**2.497.859.420**

13. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	2024	2023
Penyusutan	1.165.174.500	1.165.174.500
Pengelolaan pelantar 2	261.136.265	311.844.487
Pengelolaan Pelabuhan Kota Segara	201.689.594	169.756.877
Penyediaan fasilitas sarpras penyebrangan penumpang di Pelabuhan Kuala Riau	26.176.000	-
Labuh jangkar di Perairan Kabil, Selat Riau	21.188.200	56.092.000
Pengelolaan kapal cepat MV Lintas Kepri	2.860.000	612.192.463
Jumlah	**1.678.224.559**	**2.315.060.327**

14. BEBAN USAHA

	2024	2023
Beban administrasi dan umum		
Gaji dan tunjangan	1.556.727.371	1.798.548.996
Perjalanan dinas	228.916.986	149.947.425
Konsumsi	158.211.000	141.181.500
Imbalan pascakerja	154.003.715	-
Sewa	122.649.500	190.150.000
Penyusutan	118.830.509	99.137.261
Komisaris	74.277.778	-
Legalitas	70.145.797	48.251.650
Manajamen	42.735.500	31.626.596
Amortisasi aset takberwujud	34.735.800	34.735.800
Bahan bakar kendaraan	32.550.000	24.720.790
Jasa auditor, appraisal dan lawyer	31.580.000	-
Air dan listrik	28.765.832	32.185.934
Rumah tangga	27.279.200	-
Jamuan rapat	20.619.204	14.031.340
Piutang tak tertagih	20.000.000	-
Administrasi kantor	19.044.400	41.854.102
Telepon dan internet	18.052.618	15.024.739
Pengembangan sumber daya manusia	14.976.800	-
Pemeliharaan	3.315.300	19.763.000
Jumlah	**2.777.417.310**	**2.641.159.133**

15. PENDAPATAN / (BEBAN) LAIN-LAIN

	2024	2023
Pendapatan lain-lain		
Jasa giro dan bunga tabungan	358.471.808	40.803.956
Laba selisih kurs	1.184.025	
Lain-lain	-	311.493.879
Sub jumlah	359.655.833	352.297.835
Beban lain-lain		
Administrasi bank dan pajak jasa giro	(71.705.245)	(9.631.513)
Bunga bank	(3.368.056)	-
Rugi selisih kurs	-	(5.765.168)
Lain-lain	-	(4.828.395)
Sub jumlah	(75.073.301)	(20.225.076)
Pendapatan lain-lain - bersih	**284.582.532**	**332.072.759**

16. ASET DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING

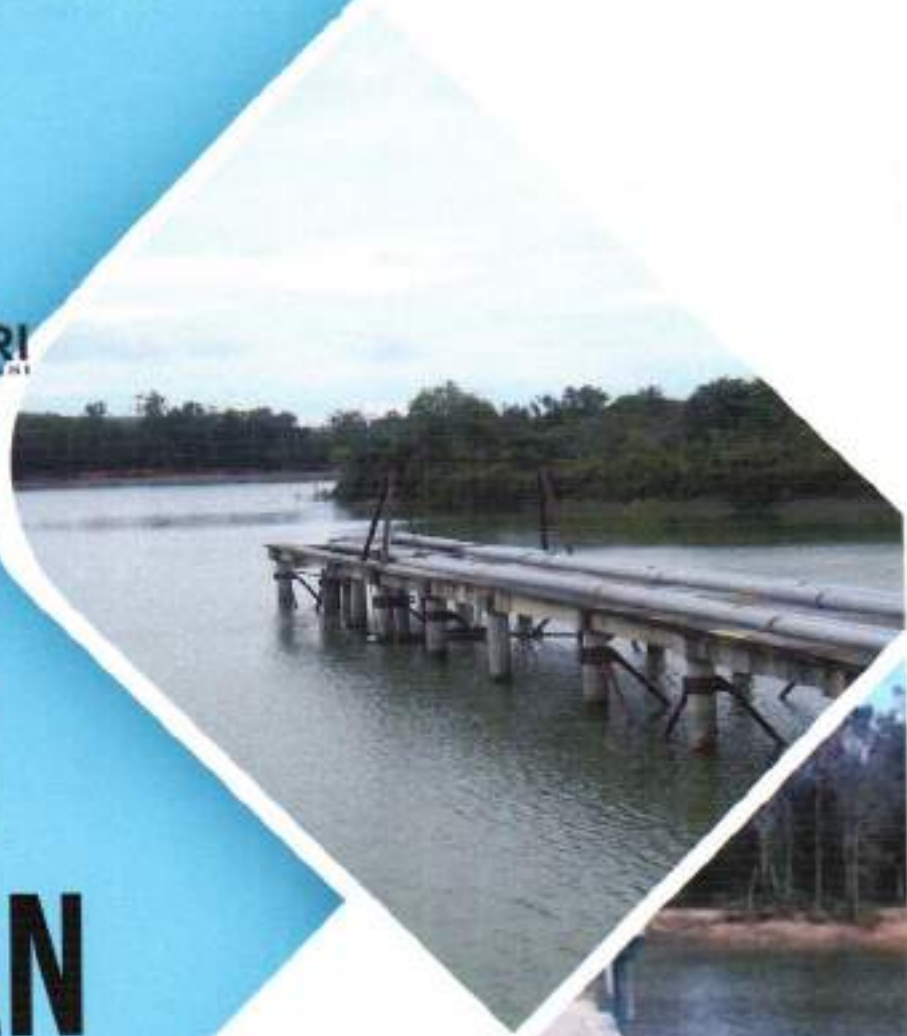
	2024	
	Mata Uang Asing	
	USD	Ekuivalen Rupiah
Aset:		
Kas dan setara kas	1.644	26.518.527
Jumlah aset	1.644	26.518.527
Kewajiban:		
Utang usaha	-	-
Jumlah kewajiban	-	-
Jumlah aset (liabilitas) neto	**1.644**	**26.518.527**

17. TANGGAL PENYELESAIAN LAPORAN

Direksi bertanggungjawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang disusun dan diotorisasi pada tanggal 12 Maret 2025.

TIRTA KEPRI

BUDAYA BERSIH & MELAYANI









LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2025

UNAUDITED

JANUARI **2026**

https://wa.me/+6281270182886

https://x.com/PDAMTirtaKepri

https://www.instagram.com/tirtakepri

https://www.facebook.com/pdamtirtakepri

0771-21574 tirtakepri.co.id perumda@tirtakepri.co.id

DAFTAR ISI

	Halaman
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	1
Laporan Laba (Rugi) Usaha	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KEPRI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	31 Des 2025 *(Unaudited)*	31 Des 2024 *(Audited)*
AKTIVA			
Aktiva Lancar			
Kas dan Setara Kas	2b , 3.	10.825.101.252	9.022.458.379
Piutang Usaha Bersih	2c , 4a.	7.139.238.898	6.882.982.634
Piutang Lain - lain	2f , 5.	210.734.199	214.294.862
Persediaan	6	962.297.059	1.180.261.059
Jumlah Aktiva Lancar		19.137.371.408	17.299.996.934
Aktiva Tidak Lancar			
Aktiva Tetap	2e,4b,7	136.762.160.293	134.830.290.958
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap		(66.792.200.006)	(61.038.943.014)
Jumlah Aktiva Tidak Lancar		69.969.960.287	73.791.347.944
Aktiva tidak berwujud/beban ditangguhkan		296.710.450	296.710.450
Jumlah Aset		**89.404.042.145**	**91.388.055.329**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Usaha	8	701.190.310	700.088.110
Beban Yang Masih Harus Dibayar	9	303.930.428	271.949.993
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		1.005.120.738	972.038.103
Liabilitas Jangka Panjang			
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	10	5.275.973.672	1.521.926.069
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		5.275.973.672	1.521.926.069
Jumlah Liabilitas		6.281.094.410	2.493.964.172
Ekuitas			
Penyertaan Modal Pemprov Kepri	11	121.303.871.063	121.303.871.063
Laba (Rugi) Ditahan	12	(36.163.827.509)	(29.287.224.547)
Laba (Rugi) Periode Berjalan	13	(2.017.095.818)	(3.122.555.359)
Jumlah Ekuitas		**83.122.947.735**	**88.894.091.157**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas		**89.404.042.145**	**91.388.055.329**

Tanjungpinang, 23 Januari 2026

Disetujui,
Perumda Air Minum Tirta Kepri

Ir. H. ABDUL KHOLIK FAJDAWANI, MM
Direktur

Dibuat,

ADIK INDARISTORO, SE
Kabag Umum dan Keuangan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KEPRI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN LABA (RUGI)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	31 Des 2025 (Unaudited)	31 Des 2024 (Audited)
Pendapatan Operasional	2g		
Pendapatan Penjualan Air	16	34.189.007.300	32.299.310.450
Pendapatan Non Air	17	2.595.826.537	2.011.876.303
Jumlah Pendapatan Operasional		**36.784.833.837**	**34.311.186.753**
Beban Operasional	2g,18		
Beban Operasional		33.137.980.745	31.387.662.210
Beban Penyusutan dan Amortisasi		5.753.256.992	6.143.844.574
Jumlah Harga Pokok Penjualan		**38.891.237.737**	**37.531.506.784**
Laba Kotor Operasional		**(2.106.403.900)**	**(3.220.320.031)**
Pendapatan (beban) Non Operasional	2g,19		
Pendapatan Non Operasional		163.771.346	142.447.897
Beban Non Operasional		(74.463.264)	(44.683.225)
Jumlah Pendapatan Non Operasional		**89.308.082**	**97.764.672**
Laba Usaha Sebelum Pajak		**(2.017.095.818)**	**(3.122.555.359)**
PPh Badan		-	-
Laba Bersih		**(2.017.095.818)**	**(3.122.555.359)**

Tanjungpinang, 23 Januari 2026

Disetujui,
Perumda Air Minum Tirta Kepri

Ir. H. ABDUL KHOLIK FAJDAWANI, MM
Direktur

Dibuat,

ADIK INDARISTORO, SE
Kabag Umum dan Keuangan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KEPRI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dinyatakan dalam Rupiah)

No	Uraian	Kekayaan Asal Dana Pembangunan Daerah Rp	Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan Rp	Hibah Rp	Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya Rp	Saldo Laba Ditahan (Akumulasi Rugi) Rp	Jumlah Ekuitas Rp
1	Saldo per 31 Desember 2024	627.736.733	104.200.090.816	15.780.429.814	695.613.700	(28.649.530.400)	92.654.340.663
	Penambahan Modal berupa Aset	-	-	-	-	-	-
	Koreksi Laba Ditahan	-	-	-	-	(637.694.147)	(637.694.147)
	Laba / Rugi Tahun 2023	-	-	-	-	(3.122.555.359)	(3.122.555.359)
2	Saldo per 31 Desember 2024	**627.736.733**	**104.200.090.816**	**15.780.429.814**	**695.613.700**	**(32.409.779.906)**	**88.894.091.157**
	Penambahan Modal berupa Aset	-	-	-	-	-	-
	Koreksi Laba Ditahan	-	-	-	-	(3.754.047.603)	(3.754.047.603)
	Laba/Rugi Tahun Berjalan 2024	-	-	-	-	(2.017.095.818)	(2.017.095.818)
3	Saldo per 31 Desember 2025	**627.736.733**	**104.200.090.816**	**15.780.429.814**	**695.613.700**	**(38.180.923.328)**	**83.122.947.735**

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KEPRI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dinyatakan dalam Rupiah)

	31 Des 2025 (Unaudited)	31 Des 2024 (Audited)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba (Rugi) Bersih	(2.017.095.818)	(3.122.555.359)
Ditambah (Dikurangi) Transaksi Non Kas		
- Beban Penyisihan Piutang	81.533.405	119.550.572
- Beban Penyusutan Aset Tetap	5.753.256.992	6.143.844.574
Laba (Rugi) Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	**3.817.694.579**	**3.140.839.786**
Penurunan/(Kenaikan) dalam Asset Lancar		
- Penurunan/(Kenaikan) Piutang Usaha	(337.789.669)	(417.811.381)
- Penurunan/(Kenaikan) Piutang Lain lain	3.560.663	(80.420.000)
- Penurunan/(Kenaikan) Persediaan	217.964.000	(347.182.434)
Jumlah (Kenaikan) / Penurunan dalam Asset Lancar	**(116.265.006)**	**(845.413.815)**
Kenaikan / (Penurunan) dalam Kewajiban Jangka Pendek		
- Kenaikan / (Penurunan) Utang Usaha	1.102.200	(337.728.631)
- Kenaikan / (Penurunan) Beban Yang masih Harus Dibayar	31.980.435	(24.372.155)
- Kenaikan / (Penurunan) Utang Imbalan Pasca Kerja	3.754.047.603	637.694.148
Jumlah Kenaikan / (Penurunan) dlm Kewajiban Jangka Pendek	**3.787.130.238**	**275.593.362**
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**7.488.559.811**	**2.571.019.333**
Arus Kas dari Aktivitas investasi		
Kenaikan / (Penurunan) Asset Tetap		
- Penambahan Tanah	-	-
- Pembelian Instalasi Pompa dan Pengolahan	(861.557.405)	(420.950.882)
- Penambahan/Pembelian Instalasi Transmisi dan Distribusi	(848.459.830)	(423.338.022)
- Pembelian Peralatan Perlengkapan	(19.723.600)	(40.800.000)
- Pembelian Kendaraan / Alat Pengangkutan	-	-
- Penambahan Bangunan	-	-
- Pembelian Inventaris / Perabot Kantor	(202.128.500)	(259.380.000)
- Aset tidak berwujud/beban ditangguhkan	-	(117.173.500)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	**(1.931.869.335)**	**(1.261.642.404)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
- Kenaikan / (Penurunan) Ekuitas	(3.754.047.603)	(637.694.147)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	**(3.754.047.603)**	**(637.694.147)**
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	**1.802.642.873**	**671.682.782**
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	9.022.458.379	8.350.775.597
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	**10.825.101.252**	**9.022.458.379**

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KEPRI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dinyatakan dalam Rupiah)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri Provinsi Kepulauan Riau adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum dan berkedudukan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang berkantor pusat di Tanjungpinang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1976 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Dati I Riau Nomor 2 Tahun 1988 sebagai salah satu unit dari PDAM Provinsi Riau. Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1976 sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Dati II Riau tersebut, maksud dan tujuan dari pendirian PDAM Tirta Kepri Provinsi Kepulauan Riau adalah bergerak dalam bidang pelayanan penyediaan air bersih dan air minum yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat.

Anggaran Dasar Perusahaan yang terdapat di Akta Pendirian tersebut telah mengalami perubahan yang dinyatakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2020, yang menyatakan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Kepri Provinsi Kepulauan Riau.

b. Susunan Pengurus

Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Kepri Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 913 Tahun 2023 Tanggal 14 Agustus 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Kepri.

Direktur Perumda Air Minum Tirta Kepri Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 236 Tahun 2024 Tanggal 30 Januari 2024 Tentang Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri Periode 2024-2029. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri Provinsi Kepulauan Riau, pengangkatan Direktur dilakukan setelah melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan.

Susunan Pengurus Perumda Air Minum Tirta Kepri Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Dewan Pengawas	:Hj. SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H., CGCAE.
Direktur	:Ir. H. ABDUL KHOLIK FAJDAWANI, MM

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Perusahaan menerapkan SAK EP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat), standar baru yang menggantikan SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yang berlaku efektif 01 Januari 2025 untuk penyusunan laporan keuangan. Oleh

Mata uang pelaporan yang digunakan entitas adalah mata uang Rupiah. Mata uang Rupiah digunakan karena memenuhi indikator sebagai mata uang fungsional, yaitu indikator arus kas, indikator harga jual dan indikator biaya.

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Sedangkan transaksi dalam mata uang asing di jabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tunai (spot rate) pada saat terjadinya transaksi. Tanggal transaksi adalah tanggal dimana transaksi pertama kali memenuhi syarat pengakuan sesuai dengan SAK EP.

a Periode Pembukuan

Periode pembukuan (Accounting period) adalah tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas meeakup Kas, simpanan yang sewaktu - waku bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang. Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaanya, disajikan sebagai "Aset yang dibatasi penggunaanya" yang kategorikan sebagai dimiliki hingga jangka tempo yaitu pada saat selesai pembatasan penggunaannya.

c. **Piutang Usaha**

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penurunan nilai yang di bentuk sebesar estimasi penyisihan piutang tak tertagih. Penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan antara lain pegalaman, prospek usaha dan industri, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas, kemampuan membayar debitur dan agunan yang dikuasai. Piutang usaha disajikan menurut piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan piutang pihak ketiga.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. **Persediaan**

Persediaan yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Kepri Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Persediaan Bahan Instalasi dan Persediaan Bahan Kimia yang perhitungannya dilaksanakan secara pencatatan berlanjut (perpetual method) dan dicatat menurut harga perolehan dengan penilaian masuk pertama keluar pertama (FIFO).

Metode pencatatan terhadap persediaan bahan operasi menggunakan metode Physical Inventory Method, sedangkan persediaan bahan instalasi dan persediaan suku cadang menggunakan metode Perpetual Method.

Biaya persediaan bahan operasi (kimia, bahan instalasi, bahan operasional lain maupun ATK) menggunakan rumus biaya dengan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau First In First Out (FIFO).

Alokasi persediaan ke aset tetap yang dilakul sebagai beban selama umur manfaat aset tersebut dan menambah nilai aset hanya jika memenuhi kondisi sebagai berikut :

a. Memperpaanjang umum ekonomis
b. Meningkatkan kapasitas, mutu, atau
c. Meningkatkan standar kinerja

Pada setiap tanggal pelaporan terhadap persediaan dilakukan penilaian kemungkinan terjadi penurunan nilai pesediaan, misalnya karena rusak atau usang. Persediaan yang menurun nilainya diukur pada harga jual dikurangi biaya untuk menjual, serta mengakui kerugian penurunan nilai dalam pos "kerugian penurunan nilai persediaan".

e. **Aset Tetap**

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya - biaya yang dapat diatribusikan lansung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi relokasi. Pajak - pajak yang dapat kreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi aset tetap tidak diperkenankan kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan di mulai pada saat asset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap di hapuskan. Penyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan perhitungan hasil usaha, kecuali memenuhi syarat untuk di kapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan SAK EP.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun
Inventaris Kantor	4
Kendaraan	5
Saluran Induk	20
Saluran Sekunder	20
Saluran Rumah	5
Peralatan Pengolahan	15
Bangunan Pengolahan	20
Peralatan Produksi Lainnya	20

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi

1). Kemungkinan Perumda Air Minum akan memperoleh manfaat ekonomis masa yang akan datang dari aset tersebut.
2). Biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Aset dapat diidentifikasi sebagai Aset Tidak Berwujud jika :

Dapat dipisahkan, yaitu kemampuannya untuk menjadi terpisah/terbagi dari perusahaan dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan melalui suatu kontrak terkait aset atau kewajiban secara individual atau kelompok.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Muncul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dapat dipisahkan dari perusahaan atau dari hak dan kewajiban lainnya.

Aset Tidak Berwujud diukur sebesar biaya perolehannya, yang meliputi harga beli, bea impor dan pajak yang tidak dapat dikreditkan, serta biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam rangka mempersiapkan aset sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuan manajemen.

f Pengakuan Pendapatan

Seluruh pendapatan baik pendapatan usaha maupun pendapatan non usaha diukur berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume. Pendapatan penjualan air diakui pada saat water meter pelanggan dibaca, untuk menilai volume pemakaian air oleh pelanggan, selanjutnya volume air dikalikan dengan tarif yang berlaku menjadi pendapatan Perumda Air Minum Tirta Kepri.

g Pengakuan Beban

Beban diakui, dicatat dan dilaporkan dalam periode terjadinya transaksi dan bukan pada saat terjadinya pembayaran. Untuk keperluan pisah batas periode akuntansi, biaya-biaya yang terjadi sebelum tanggal neraca walaupun belum dapat diketahui secara pasti jumlahnya, dicatat dan dilaporkan dengan cara estimasi yang wajar.

h Beban Ditangguhkan

Biaya praoperasional dan biaya-biaya lain yang sejenis dan memberikan manfaat lebih dari satu tahun dikapitalisasi sebagai beban yang ditangguhkan dan diamortisasi selama lima tahun.

Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat diestimasi umur manfaatnya, maka umur manfaatnya dianggap 10 tahun.

i Bunga Pinjaman Jangka Panjang

Beban bunga atas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk membiayai proyek konstruksi dibukukan sebagai penambahan biaya konstruksi selama masa pembangunan sampai proyek tersebut dinyatakan selesai dan beroperasi. Setelah masa konstruksi selesai, bunga pinjaman dibebankan sebagai biaya tahun berjalan dalam kelompok biaya umum.

3. KAS DAN SETARA KAS

	31 Des 2025	31 Des 2024
Rincian atas saldo Kas R/K Bank pada Kas dan Rekening Bank		
- Kas Besar	83.560.050	80.219.692
- Kas kecil	3.750.000	3.750.000
- Bank Riau Kepri 103.05.04070	74.857.226	71.899.689
- BRI TPI 00000174-01-000107-30-8	3.937.722.493	5.161.470.820
- BRI KC Kijang 5566-01-000025-30-4	1.460.016	1.892.016
- Bank Mandiri TPI 109.00.0617305.8	1.473.139.495	704.537.103
- Bank Mandiri Tg.Uban 109-00-9705701-2	14.996.330	15.591.130
- Bank Riau Kepri Syariah Tpi 82-10-30000-2	946.804.529	726.454.496
- BNI Tpi 0136270020	1.918.693.195	804.585.230
- BNI Kc. Tg. Uban 0585687370	4.178.100	294.652
- BPR Duta Kepri 01.8.000003.0	96.879.119	83.154.483
- BPR Duta Kepri 01.8.0000031.6	1.399.060.699	498.609.068
Jumlah	**9.955.101.252**	**8.152.458.379**
Deposito		
- Deposito BRI	300.000.000	300.000.000
- Deposito Bank Mandiri	170.000.000	170.000.000
- Deposito BPR Duta Kepri	300.000.000	300.000.000
- Deposito Bank Riau Kepri	100.000.000	100.000.000
Jumlah	**870.000.000**	**870.000.000**
Jumlah kas dan setara kas	**10.825.101.252**	**9.022.458.379**

4. PIUTANG USAHA - BERSIH

	31 Des 2025	31 Des 2024
Saldo Piutang Usaha Perunda Air Minum Tirta Kepri terdiri dari :		
- Piutang Air	9.481.676.216	9.143.886.547
- Penyisihan Piutang	(2.342.437.318)	(2.260.903.913)
Jumlah Piutang Usaha	**7.139.238.898**	**6.882.982.634**

Rincian Piutang Air adalah sebagai berikut :

Piutang Usaha Berdasarkan Kelompok Pelanggan :		
- Piutang Pelanggan Rek.RT	5.385.561.166	5.314.336.066
- Piutang Pelanggan Rek.IP	1.172.485.450	943.211.081
- Piutang Pelanggan NK	2.181.910.800	2.141.336.400
- Piutang Pelanggan NB	393.086.800	385.322.850
- Piutang Pelanggan Industri	52.354.550	21.722.950
- Piutang Pelanggan Sosial-Umum	13.676.400	13.769.150
- Piutang Pelanggan Sosial-Khusus	147.116.050	141.087.450
- Piutang Rek.Pelanggan Golongan Khusus	135.485.000	183.100.600
Jumlah	**9.481.676.216**	**9.143.886.547**

Rincian Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Usaha Berdasarkan Kelompok Pelanggan :		
- Piutang Pelanggan Rek.RT	1.313.897.406	1.296.698.000
- Piutang Pelanggan Rek.IP	435.734.676	350.497.238
- Piutang Pelanggan NK	416.890.423	409.209.385
- Piutang Pelanggan NB	45.204.982	44.312.128
- Piutang Pelanggan Industri	5.108.447	2.119.194
- Piutang Pelanggan Sosial-Umum	3.807.864	3.833.943
- Piutang Pelanggan Sosial-Khusus	26.435.664	25.359.685
- Piutang Rek.Pelanggan Gol Khusus	95.357.856	128.874.340
Jumlah	**2.342.437.318**	**2.260.903.913**

5 PIUTANG LAIN LAIN

	31 Des 2025	31 Des 2024
- Piutang Pegawai	188.859.337	192.420.000
- Piutang Pendapatan Bunga Deposito	14.217.100	14.217.100
- Piutang atas SI. Dinas	7.467.762	7.467.762
- Piutang Jaminan Langganan	190.000	190.000
Jumlah Piutang Lain-lain	**210.734.199**	**214.294.862**

6 PERSEDIAAN

	31 Des 2025	31 Des 2024
- Persediaan Bahan Kimia	230.086.070	533.734.750
- Persediaan Pipa pipa	120.367.100	111.101.000
- Persediaan Water Meter	320.203.240	202.615.440
- Persediaan Accessories	243.519.234	303.109.654
- lainnya	48.121.415	29.700.215
Jumlah Persediaan	**962.297.059**	**1.180.261.059**

7 AKTIVA TETAP

	31 Desember 2025			
Keterangan	**Saldo Awal**	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo Akhir**
Harga Perolehan:				
Tanah	32.674.761.937	-	-	32.674.761.937
Instalasi Pompa	7.329.021.437	861.557.405	-	8.190.578.842
Instalasi Pengolahan	34.556.012.030	-	-	34.556.012.030
Instalasi Transmisi dan Distribusi	49.501.625.377	848.459.830	-	50.350.085.207
Bangunan	4.130.627.593	-	-	4.130.627.593
Peralatan & Perlengkapan	1.264.417.829	19.723.600	-	1.284.141.429
Kendaraan / Alat	1.981.456.765	-	-	1.981.456.765
Inventaris / Perabot	3.392.367.990	202.128.500	-	3.594.496.490
Jumlah	**134.830.290.958**	**1.931.869.335**	**-**	**136.762.160.293**
Akum. Penyusutan:				
Instalasi Pompa	5.957.219.236	265.811.400	-	6.223.030.636
Instalasi Pengolahan	14.641.769.364	1.492.380.429	-	16.134.149.794
Instalasi Transmisi dan Distribusi	32.218.324.855	3.686.614.040	-	35.904.938.895
Bangunan	1.762.200.256	91.697.697	-	1.853.897.952
Peralatan & Perlengkapan	1.238.836.801	34.676.241	-	1.273.493.042
Kendaraan / Alat	1.925.769.674	34.305.580	-	1.960.075.254
Inventaris / Perabot	3.294.842.828	147.771.605	-	3.442.614.433
Jumlah	**61.038.943.014**	**5.753.256.992**	**-**	**66.792.200.606**
Nilai Buku	**73.791.347.945**			**69.969.960.287**

7 AKTIVA TETAP (lanjutan)

Keterangan	31 Desember 2024 Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan:				
Tanah	32.674.761.937	-	-	32.674.761.937
Instalasi Pompa	6.925.275.555	403.745.882		7.329.021.437
Instalasi Pengolahan	34.538.807.030	17.205.000	-	34.556.012.030
Instalasi Transmisi dan Distribusi	49.078.287.355	423.338.022	-	49.501.625.377
Bangunan	4.130.627.593	-		4.130.627.593
Peralatan & Perlengkapan	1.223.617.829	40.800.000		1.264.417.829
Kendaraan / Alat	1.981.456.765	-	-	1.981.456.765
Inventaris / Perabot	3.132.987.990	259.380.000	-	3.392.367.990
Jumlah	**133.685.822.054**	**1.144.468.904**	**-**	**134.830.290.958**
Akum. Penyusutan:				
Instalasi Pompa	5.681.059.476	276.159.760	-	5.957.219.236
Instalasi Pengolahan	13.136.012.170	1.505.757.194	-	14.641.769.364
Instalasi Transmisi dan Distribusi	28.222.293.753	3.996.031.102	-	32.218.324.855
Bangunan	1.667.105.980	95.094.276	-	1.762.200.256
Peralatan & Perlengkapan	1.196.124.855	42.691.946	-	1.238.816.801
Kendaraan / Alat	1.864.228.492	61.541.182	-	1.925.769.674
Inventaris / Perabot	3.128.273.714	166.569.114	-	3.294.842.828
Jumlah	**54.895.098.440**	**6.143.844.574**	**-**	**61.038.943.014**
Nilai Buku	78.790.723.614			73.791.347.944

8 AKTIVA TIDAK BERWUJUD

	31 Des 2025	31 Des 2024
- Bebas ditangguhkan	296.710.450	296.710.450

9 UTANG USAHA

	31 Des 2025	31 Des 2024
- CV. Ecomoda Bestari Tunjungpinang	73.942.000	73.942.000
- PT. Bima Sakti Alterra Bali	26.774.310	26.030.610
- PT. Mahkota Jaya Raya Jakarta	115.425.000	406.023.000
- Toko Maspion Tanjungpinang	-	38.692.500
- Inkop Pansi Jakarta	485.049.000	155.400.000
Jumlah Utang Usaha	701.190.310	700.088.110

10 BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	31 Des 2025	31 Des 2024
- Tunjangan Yang Masih Harus dibayar	144.547.000	142.921.000
- Lembur Yang Masih Harus dibayar	130.048.682	111.088.103
- Biaya Yang Masih Harus dibayar lainnya	29.334.746	17.940.890
Jumlah Beban Yang Masih Harus Dibayar	**303.930.428**	**271.949.993**

11 KEWAJIBAN IMBALAN PASKA KERJA

Perumda Air Minum Tirta Kepri adalah anggota PERPAMSI (Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia), oleh karena itu dalam hal asuransi dana pensiun mengikuti program dana pensiun PERPAMSI yang dikelola oleh Yayasan Dana Pensiun PERPAMSI (DAPENMA PAMSI). Sesuai dengan surat DAPENMA PAMSI Nomor : 4669/DP.06/XII/2025 perihal kewajiban iuran pensiun minimum sementara, dinyatakan kewajiban aktuaria imbalan pasca kerja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 5.275.973.672,-

12 MODAL DASAR

	31 Des 2025	31 Des 2024
Modal Dasar	632.442.832	632.442.832
Modal Yang Ditarik kembali oleh Pemda Tkt. I Riau Kendaraan Roda 4 & 2	(4.706.099)	(4.706.099)
Jumlah Modal Dasar	**627.736.733**	**627.736.733**

Penarikan kembali beberapa kendaraan roda empat dan roda dua oleh Pemda Tingkat I Riau sebesar Rp 4.706.098,00 terjadi dalam tahun 1983 sehingga mengurangi modal dasar sebagaimana tercantum dalam Perda No 2 tahun 1998.

13 KEKAYAAN PEMDA YANG DIPISAHKAN

Jumlah tersebut merupakan nilai penyertaan modal pemerintah Pemprov Kepri per 31 Desember 2025 dan 2024 atas penyerahan pengelolaan aset, dengan rincian sebagai berikut :

	31 Des 2025	31 Des 2024
- Kekayaan Pemda yang dipisahkan-Pemprov	4.417.176.400	4.417.176.400
- Tambahan penyertaan modal Pemprov	6.820.649.969	6.820.649.969
- Tambahan penyertaan modal Pemprov Kepri (Atas Penghapusan Hutang R	22.334.448.921	22.334.448.921
- Kekayaan pemda yang dipisahkan-Pemkab	1.682.138.710	1.682.138.710
- Tambahan penyertaan modal Pemprov Kepri(Atas Penambahan Aset Tetap	68.945.676.816	68.945.676.816
Jumlah	**104.200.090.816**	**104.200.090.816**

Penyertaan Modal Pemprov Kepri	31 Des 2025	31 Des 2024
- Modal Pemda Dati II Kab Kepulauan Riau	1.682.138.710	1.682.138.710
- Penyertaan Modal Pemprov Kepri	4.417.176.400	4.417.176.400
- Tambahan Penyertaan Modal (Bahan Instalasi)	553.166.860	553.166.860
- Tambahan dari cabang Tanjung Uban	2.184.249.312	2.184.249.312
- Tambahan dari cabang Kijang	4.083.233.797	4.083.233.797
- Tambahan Penyertaan Modal Pemprov Kepri (Penghapusan Hutang RDA)	22.334.448.921	22.334.448.921
- Tambahan Penyertaan Modal Pemprov Kepri (Penambahan Aset Tetap)	68.945.676.816	68.945.676.816
Jumlah penyertaan modal Pemprov Kepri	**104.200.090.816**	**104.200.090.816**

14 PENYERTAAN PEMDA YANG BELUM DITETAPKAN

	31 Des 2025	31 Des 2024
- Subsidi Pemda TK I Riau dengan Pemerintah Pusat	564.033.700	564.033.700
- Subsidi Silang antar PDAM	131.580.000	131.580.000
Jumlah	**695.613.700**	**695.613.700**

Subsidi Pemda Tk I Riau merupakan subsidi Pemda Tk I Riau dan pemerintah pusat (APBN) yang masih belum ditetapkan statusnya berupa bahan kimia dan instalasi lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut :

	31 Des 2025	31 Des 2024
- Bahan Kimia		
- Dipda tahun anggaran 1980/1981	46.500.000	46.500.000
- Dipda tahun anggaran 1980/1981	70.000.000	70.000.000
- Instalasi Listrik		
- Dipda tahun anggaran 1982/1983	60.000.000	60.000.000
- Instalasi Perpompan		
- Dipda tahun anggaran 1983/1984	56.000.000	56.000.000
- Pengadaan dan Pemasangan Pipa Trans dan Distribusi		
- Dipda tahun anggaran 1984/1985	71.588.700	71.588.700
- Instalasi Perluasan Jaringan Pipa		
- Dipda tahun anggaran 1984/1985	71.955.000	71.955.000
- Pengadaan dan pemasangan Jaringan Pipa Distribusi		
- Dipda tahun anggaran 1986/1987	71.079.000	71.079.000
- Pembuatan tanggul pada instalasi penjernihan S. Pulai		
- Dipda tahun anggaran 1989/1990	116.320.000	116.320.000
- Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi		
- Dipda tahun anggaran 1990/1991	591.000	591.000
Jumlah	**564.033.700**	**564.033.700**

15 HIBAH

	31 Des 2025	31 Des 2024
- Modal Hibah Pemda Tk II Kepri	250.000.000	250.000.000
- Modal Hibah Bantuan PPAB Pemda Tk II Kepri	49.326.000	49.326.000
- Modal Hibah Pemprov Kepri	2.500.000.000	2.500.000.000
- Modal Tanah	9.374.808.175	9.374.808.175
- Modal Hibah Pihak ke - 3 :	-	-
PT. Sinar Bodhy Cipta	727.138.739	727.138.739
PT. Duta Jaya Sakti	105.894.013	105.894.013
PT. Duta Perumahan Inti Sakti	6.737.500	6.737.500
- Modal Hibah Perum Perumnas	2.766.525.387	2.766.525.387
	15.780.429.814	**15.780.429.814**

16 LABA (RUGI) DITAHAN DAN PERIODE BERJALAN

	31 Des 2025	31 Des 2024
- Laba Ditahan	(32.409.779.906)	(28.649.530.400)
- Penyesuian Laba Ditahan	(3.754.047.603)	(637.694.147)
- Saldo Laba (Rugi) Berjalan	(2.017.095.818)	(3.122.555.359)
Jumlah	**(38.180.923.328)**	**(32.409.779.906)**
- Akumulasi kerugian sampai dengan tahun 2013	(16.403.957.141)	(16.403.957.141)
- Koreksi bunga pinjaman RDA tahun 2012 dan 2013	(3.632.987.058)	(3.632.987.058)
- Akumulasi Laba (Rugi) tahun 2014	(2.937.775.571)	(2.937.775.571)
- Laba tahun 2014	934.127.594	934.127.594
- Rugi tahun 2015 dan 2019	(3.815.946.150)	(3.815.946.150)
- Laba tahun 2020	2.276.059.834	2.276.059.834
- Rugi tahun 2021	(8.044.425)	(8.044.425)
- Koreksi laba ditahan	(2.854.065.562)	899.982.041
- Rugi tahun 2022	(4.349.624.474)	(4.349.624.474)
- Rugi tahun 2023	(2.249.059.197)	(2.249.059.197)
- Rugi tahun 2024	(3.122.555.359)	(3.122.555.359)
- Rugi tahun 2025	(2.017.095.818)	-
	(38.180.923.328)	**(32.409.779.906)**

17 PENDAPATAN PENJUALAN AIR

	31 Des 2025	31 Des 2024
- Harga Air	30.889.485.800	29.067.709.450
- Dana Meter	2.872.365.000	2.812.750.000
- Administrasi	427.156.500	418.851.000
Jumlah Pendapatan Penjualan Air	**34.189.007.300**	**32.299.310.450**

18 PENDAPATAN NON AIR

	31 Des 2025	31 Des 2024
- Pendapatan Sambungan Baru	1.174.606.358	531.930.174
- Pendapatan Denda	768.834.500	838.886.000
- Pendapatan Penyambungan Kembali	130.800.000	139.000.000
- Pendapatan Penggantian Meter Rusak	14.520.000	23.430.000
- Pendapatan Pemeriksaan Instalasi Pelanggan	570.000	60.000
- Jaminan langganan	122.250.000	53.850.000
- Pendapatan denda pelanggaran	29.320.000	36.147.500
- Pendapatan Non Air Lainnya	354.925.679	388.572.629
Jumlah Pendapatan Non Air	**2.595.826.537**	**2.011.876.303**
Jumlah Pendapatan	**36.784.833.837**	**34.311.186.753**

19 BEBAN OPERASIONAL

	31 Des 2025	31 Des 2024
- Beban Pegawai	14.592.574.283	14.555.095.350
- Beban Listrik	7.222.524.257	7.817.811.864
- Beban Pemakaian Bahan Kimia	2.245.751.700	1.565.498.150
- Beban Pemeliharaan	2.771.550.361	2.846.920.448
- Beban Operasional Lainnya	6.305.580.164	4.602.336.398
Jumlah	**33.137.980.745**	**31.387.662.210**
- Beban Penyusutan	5.753.256.992	6.143.844.574
Jumlah	**38.891.237.737**	**37.531.506.784**

Rincian dari beban operasional :

Beban Pegawai		
- Beban Pegawai - Operasi Pengolahan Air	3.074.556.436	3.303.134.026
- Beban Pegawai - Operasi Transmisi dan Distribusi	1.254.319.378	1.567.367.598
- Beban Pegawai - Umum dan Administrasi	10.263.698.469	9.684.593.726
Jumlah	**14.592.574.283**	**14.555.095.350**
Beban Listrik		
- Beban Listrik Produksi	7.139.368.541	7.616.418.812
- Beban Listrik - Operasi Transmisi dan Distribusi	83.155.696	201.393.052
Jumlah	**7.222.524.237**	**7.817.811.864**
Beban Pemakaian Bahan Kimia		
- Beban Pemakaian Bahan Kimia	2.245.751.700	1.565.498.150
Beban Pemeliharaan		
- Beban Pemeliharaan Pengolahan Air	531.325.877	644.939.479
- Beban Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi	1.918.679.232	1.869.877.560
- Beban Pemeliharaan Umum dan Administrasi	321.545.252	332.103.409
Jumlah	**2.771.550.361**	**2.846.920.448**
Beban Operasional Lainnya		
- Beban Kantor	606.313.381	381.938.705
- Beban penyisihan Piutang	81.533.405	119.550.572
- Beban Operasional lainnya	5.617.733.378	4.100.847.121
Jumlah	**6.305.580.164**	**4.602.336.398**
Beban Penyusutan		
- Beban Penyusutan Pengolahan Air	1.758.191.829	1.781.916.954
- Beban Penyusutan Transmisi dan Distribusi	3.686.614.040	3.996.031.102
- Beban Penyusutan Instalasi umum	308.451.123	365.896.518
Jumlah	**5.753.256.992**	**6.143.844.574**

20 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

Pendapatan Non Operasional	**31 Des 2025**	**31 Des 2024**
- Pendapatan Jasa Giro	138.665.693	115.565.425
- Pendapatan Bunga Deposito	25.105.653	26.882.472
Jumlah	**163.771.346**	**142.447.897**

Beban Non Operasional	**31 Des 2025**	**31 Des 2024**
- Beban Lain lain	(74.463.264)	(44.683.225)
Jumlah	**(74.463.264)**	**(44.683.225)**

LAMPIRAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA KEPRI
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN MENURUT KemenPUPR TAHUN 2025 (UNAUDITED)

NO.	INDIKATOR	RUMUS	Penilaian		Bobot	Nilai	Hasil
I.	ASPEK KEUANGAN						
1a.	Return on Equity (ROE)	Laba (Rugi) Setelah Pajak / Jumlah Ekuitas x 100 %	(2.017.095.818) / 83.122.947.735 x 100 % =	(2,43)	0,055	1	0,055
1b.	Rasio Operasional	Biaya Operasi / Pendapatan Operasi	38.965.701.001 / 36.948.605.183 =	1,05	0,055	1	0,055
2a	Resio Kas	Kas+Setara Kas / Hutang Lancar x 100 %	10.825.101.252 / 1.005.120.738 x 100 % =	1.077,00	0,055	5	0,275
2b	Efektifitas Penagihan	Jumlah Penerimaan Rekening Air / Jumlah Rekening Air x 100 %	30.119.213.600 / 34.189.007.300 x 100 % =	88,10	0,055	4	0,220
3	Solvabilitas	Total Aktiva / Total Hutang x 100 %	89.404.042.145 / 6.281.094.410 x 100 % =	1.423,38	0,030	5	0,150
II.	ASPEK PELAYANAN						
1	Cakupan Pelayanan Teknis	Jumlah Penduduk Terlayani / Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan x 100 %	91.659 / 267.011 x 100 % =	34,33	0,050	2	0,100
2	Pertumbuhan Pelanggan	Jmh Pelanggan thn ini - pelanggan thn lalu / pelanggan tahun lalu x 100 %	692 / 31.070 x 100 % =	2,23	0,050	1	0,050
3	Penyelesaian Pengaduan	Jumlah Pengaduan Selesai Ditangani / Jumlah Pengaduan x 100 %	4.469 / 4.904 x 100 % =	91,13	0,025	5	0,125
4	Kualitas Air Pelanggan	Jumlah Uji Kualitas Yg Memenuhi syarat / Jumlah yang Diuji	12 / 168 x 100 % =	7,14	0,075	1	0,075
5	Konsumsi Air Domestik	Jmh Air Yang Terjual pada Pel.Domestik / Jumlah Pelanggan Domestik	4.670.504 / 23.240	16,75	0,050	2	0,100
	Jumlah Nilai yang Diperoleh						1,205

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA KEPRI
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN MENURUT KemenPUPR TAHUN 2025 (UNAUDITED)

NO.	INDIKATOR	RUMUS	Penilaian		Bobot	Nilai	Hasil
III	ASPEK OPERASI						
1	Rasio Produksi	Volume Produksi Riil / Jumlah Kapasitas Terpasang x 100 %	10.269.009 / 9.802.944 x 100 % =	104,75	0,070	5	0,350
2	Kehilangan Air	Air Didistribusikan - Air Terjual / Jumlah Air Didistribusikan x 100 %	3.899.736 / 9.143.622 x 100 % =	42,65	0,070	1	0,070
3	Jam Operasi Layanan	Jumlah Waktu Pelayanan/Distribusi / 365 hari	22.905 / 1.095	20,92	0,080	4	0,320
4	Tekanan Air pada SR	Jmh Pelanggan dilayani dgn tekanan> 0,7Bar / Jumlah Pelanggan Aktif x 100 %	16.819 / 24.121 x 100 % =	69,73	0,065	4	0,260
5	Penggantian / Kalibrasi Meter Air	Jumlah Meter Yg diganti/dikalibrasi Setahun / Jumlah Pelanggan Aktif x 100 %	2.644 / 24.121 x 100 % =	10,96	0,065	3	0,195
IV	ASPEK SDM						
1	Rasio Pegawai Terhadap Pelanggan	Jumlah Pegawai / Jumlah Seluruh Pelanggan x 1.000 =	125 / 31.762 x 1.000 =	3,94	0,070	5	0,350
2	Rasio Diklat Pegawai	Jumlah Pegawai yang Ikut Diklat / Jumlah Pegawai x 100 %	157 / 125 x 100 % =	125,60	0,040	5	0,200
3	Rasio Biaya Diklat	Realisasi Biaya Diklat / Realisasi Biaya Pegawai x 100 %	42.922.500,00 / 14.592.574.283,00 x 100 % =	0,29	0,040	1	0,040
	Jumlah Nilai yang Diperoleh						2,99
	PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN MENURUT KemenPUPR :			SEHAT			

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA KEPRI
PERHITUNGAN DAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN KEMENDAGRI NO.47 TAHUN 1999
TAHUN BUKU 2025 DAN 2024

No	NILAI KINERJA	PENJELASAN	TAHUN BUKU 2025 (UNAUDITED)	TAHUN BUKU 2024 (AUDITED)
1	KLASIFIKASI KINERJA			
	NILAI KINERJA / KINERJA > 75 BAIK SEKALI > 60-75 BAIK > 45-60 CUKUP > 30-45 KURANG <= 30 TIDAK BAIK			
2	PENILAIAN KINERJA			
	ASPEK / JUMLAH BOBOT / JUMLAH INDIKATOR / MAKSIMUM NILAI KEUANGAN 45 10 60 OPERASIONAL 40 10 47 ADMINISTRASI 15 10 36 100 30 143	ASPEK PERHITUNGAN	NILAI KINERJA	NILAI KINERJA
		KEUANGAN = Jumlah nilai yang diperoleh / Maksimum nilai x Bobot		
		= 34/60 x 45 =	25,50	25,50
		OPERASIONAL = Jumlah nilai yang diperoleh / Maksimum nilai x Bobot		
		= 24/47 x 40 =	20,43	21,28
		ADMINISTRASI = Jumlah nilai yang diperoleh / Maksimum nilai x Bobot		
		= 35/36 x 15 =	14,58	14,58
		NILAI KINERJA / KINERJA =	**60,51 BAIK**	61,36 BAIK

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA KEPRI
PERHITUNGAN DAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN KEMENDAGRI NO.47 TAHUN 1999
TAHUN BUKU 2025 DAN 2024

NO.	INDIKATOR	RUMUS	TAHUN BUKU 2025 (UNAUDITED) (Tahun Ini)			TAHUN BUKU 2024 (AUDITED) (Tahun Lalu)		
			Penilaian	Bobot	Nilai	Penilaian	Bobot	Nilai
I.	ASPEK KEUANGAN							
1.	Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif	Laba sebelum Pajak / Aktiva Produktif x 100 %	(2.017.090.818,47) / 89.404.042.145,36 x 100%	-2,26%	1,00	(3.122.555.333,45) / 91.388.055.329,00 x 100%	-3,42%	1,00
1.a.	Peningkatan Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif	Rasio Laba thd Aktiva Produktif thn ini - Rasio Laba thd Aktiva Produktif thn lalu	-2,26% - -3,42%	1,16%	1,00	-3,42% - 0,02%	-3,40%	1,00
2.	Rasio Laba terhadap Penjualan	Laba sebelum Pajak / Penjualan x 100 %	(2.017.090.818,47) / 36.784.833.837,00 x 100%	-5,48%	1,00	(3.122.555.333,45) / 34.311.186.753,00 x 100%	-9,10%	1,00
2.a.	Peningkatan Rasio Laba terhadap Penjualan	Rasio Laba thd Penjualan thn ini - Rasio Laba terhadap Penjualan thn lalu	-5,48% - -9,10%	3,62%	2,00	-9,10% - -13,98%	4,88%	2,00
3.	Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar	Aktiva Lancar / Utang Lancar	18.137.371.408,00 / 1.005.120.738,00	18,04	1,00	17.299.999.934,00 / 972.039.103,00	17,80	1,00
4.	Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Ekuitas	Utang Jangka Panjang / Ekuitas	5.275.973.672,00 / 83.122.947.735,00	0,06	5,00	1.521.926.069,00 / 88.894.081.166,55	0,02	5,00
5.	Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang	Total Aktiva / Total Utang	89.404.042.145,36 / 6.281.094.410,00	14,23	5,00	91.388.055.329,00 / 2.493.964.172,00	36,64	5,00
6.	Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi	Biaya Operasi / Pendapatan Operasi	38.965.701.001,47 / 36.948.666.383,00	1,05	1,00	37.576.193.009,45 / 34.453.634.650,00	1,09	1,00
7.	Rasio Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo.	Laba Operasi sebelum Biaya Penyusutan / (Angsuran Pokok + Bunga) jatuh Tempo	3.738.161.174,00 / 0,00	-	5,00	3.037.269.215,00 / 0,00	-	5,00
8.	Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air	Aktiva Produktif / Penjualan Air	89.404.042.145,36 / 34.169.007.300,00	2,61	4,00	91.388.055.329,00 / 32.299.310.460,00	2,83	4,00
9.	Jangka Waktu Penagihan Piutang	Piutang Usaha / Jumlah Penjualan per hari	7.139.238.888,00 / 101.229.955,30	70,53	4,00	6.882.982.694,00 / 94.393.519,59	72,93	4,00
10.	Efektifitas Penagihan	Rekening Tertagih / Penjualan Air x 100 %	30.119.213.600,00 / 34.169.007.300,00 x 100 %	88,15%	4,00	28.290.820.290,00 / 32.299.310.460,00 x 100%	87,61%	4,00
Jumlah Nilai yang di Peroleh					34,00			34,00
NILAI KINERJA ASPEK KEUANGAN			34 / 60 x 45 =		25,50	34 / 60 x 45 =		25,50

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA KEPRI
PERHITUNGAN DAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN KEMENDAGRI NO.47 TAHUN 1999
TAHUN BUKU 2025 DAN 2024

NO.	INDIKATOR	RUMUS	TAHUN BUKU 2025 (UNAUDITED) (Tahun Ini)			TAHUN BUKU 2024 (AUDITED) (Tahun Ini)		
			Penilaian	Bobot	Nilai	Penilaian	Bobot	Nilai
B.	ASPEK OPERASIONAL							
1.a	Cakupan Pelayanan	Jumlah Pelanggan Terlayani / Jumlah Penduduk x 100 %	91.659,00 / 267.011,00 x 100 % = 34,33%	2,00		107.325,00 / 267.011,00 x 100 % = 40,19%	3,00	
1.b	Peningkatan Cakupan Pelayanan	Cakupan Pelayanan Tahun Ini — Cakupan Pelayanan Tahun Lalu	34,33% - 40,19% = -5,87%	1,00		40,19% - 60,17% = -19,97%	1,00	
2.	Kualitas Air Didistribusi	Kualitas Air : - Memenuhi syarat air minum	Memenuhi syarat Air Bersih (MSAB)	2	2,00	Memenuhi syarat Air Bersih (MSAB)	2	2,00
3.	Kontinuitas Air	Kontinuitas Air : - Semua Pelanggan mendapat aliran air 24 jam	Belum Semua Pelanggan mendapatkan aliran air 24 jam	1	1,00	Sudah Semua Pelanggan mendapatkan aliran air 24 jam	1	1,00
4.	Produktifitas Pemanfaatan Instalasi Produksi	Kapasitas Produksi / Kapasitas terpasang x 100 %	10.269.000,00 / 9.802.944,00 x 100 % = 104,75%	4,00		9.128.276,00 / 9.802.944,00 x 100 % = 93,12%	3,00	
5.a	Tingkat Kehilangan Air	Jumlah m3 air yang didistribusikan - (Kurang) air Terjual / Jumlah m3 air yang di didistribusikan x 100 %	3.869.735,80 / 9.143.622,25 x 100 % = 42,65%	1,00		3.227.443,00 / 8.329.986,00 x 100 % = 38,75%	2,00	
5.b	Penurunan Tingkat Kehilangan Air	Rasio Tahun ini — Rasio Tahun Lalu	42,65% - 38,75% = 3,90%	1,30		38,75% - 37,69% = 1,05%	1,00	
6.	Penera an Meter	Jumlah Pelanggan yang meter airnya ditera / Jumlah seluruh Pelanggan x 100 %	57,00 / 31.762,00 x 100 % = 0,18%	1,00		31,00 / 31.070,00 x 100 % = 0,10%	1,00	
7.	Kecepatan Penyambungan Baru	<= 6 Hari Kerja > 6 Hari Kerja	<= 6 Hari Kerja	2	2,00	<= 6 Hari Kerja	2	2,00
8.	Kemampuan Penanganan Pengaduan maksimal perbulan	Jumlah Pengaduan yang telah selesai ditangani / Jumlah seluruh Pengaduan x 100 %	4.460 / 4.904 x 100 % = 91,13%	2,00		3.972 / 4.406 x 100 % = 88,35%	2,00	
9.	Kemudahan Pelayanan	Tersedianya service point di luar Kantor Pusat	Tersedia	2	2,00	Tersedia	2	2,00
10.	Rasio Karyawan per 1.000 Pelanggan	Jumlah Karyawan / Jumlah Pelanggan x 1.000 =	125 / 24.121 x 1000 = 5,18	5,00		124 / 23.451 x 1000 = 5,29	5,00	
	Jumlah Nilai yang di Peroleh				24,30			25,00
	NILAI KINERJA ASPEK OPERASIONAL		24 / 47 x 40 =		39,83	25 / 47 x 40 =		31,38

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA REPEL
PERHITUNGAN DAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN KEMENDAGRI NO.47 TAHUN 1999
TAHUN BUKU 2025 DAN 2024

NO.	INDIKATOR	RUMUS		TAHUN BUKU 2025 (UNAUDITED) (Tahun Ini)			TAHUN BUKU 2024 (AUDITED) (Tahun Ini)		
				Penilaian	Bobot	Nilai	Penilaian	Bobot	Nilai
III.	ASPEK ADMINISTRASI								
1.	Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan)	Sepenuhnya dipedomani Dipedomani sebagian Memiliki, belum dipedomani Tidak memiliki	4 3 2 1	Sepenuhnya dipedomani		4,00	Sepenuhnya dipedomani	4,00	4,00
2.	Rencana Organisasi dan Uraian Tugas	Sepenuhnya dipedomani Dipedomani sebagian Memiliki, belum dipedomani Tidak memiliki	4 3 2 1	Sepenuhnya dipedomani		4,00	Sepenuhnya dipedomani	4,00	4,00
3.	Prosedur Operasi Standar (SOP)	Sepenuhnya dipedomani Dipedomani sebagian Memiliki, belum dipedomani Tidak memiliki	4 3 2 1	Sepenuhnya dipedomani		4,00	Sepenuhnya dipedomani	4,00	4,00
4.	Gambar Nyata Lakuasa (As Built Drawing)	Sepenuhnya dipedomani Dipedomani sebagian Memiliki, belum dipedomani Tidak memiliki	4 3 2 1	Sepenuhnya dipedomani		4,00	Sepenuhnya dipedomani	4,00	4,00
5.	Pedoman Penilaian Kerja Karyawan	Sepenuhnya dipedomani Dipedomani sebagian Memiliki, belum dipedomani Tidak memiliki	4 3 2 1	Sepenuhnya dipedomani		4,00	Sepenuhnya dipedomani	4,00	4,00
6.	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)	Sepenuhnya dipedomani Dipedomani sebagian Memiliki, belum dipedomani Tidak memiliki	4 3 2 1	Sepenuhnya dipedomani		4,00	Sepenuhnya dipedomani	4,00	4,00
7.	Terlih Laporan Internal	Dibuat tepat waktu Tidak tepat waktu	2 1	Tepat Waktu		2,00	Tepat Waktu	2,00	2,00
8.	Terlih Laporan Eksternal	Dibuat tepat waktu Tidak tepat waktu	2 1	Tepat Waktu		2,00	Tepat Waktu	2,00	2,00
9.	Opini Auditor Independen	Wajar Tanpa Pengecualian Wajar Dengan Pengecualian Tidak Menyatakan Pendapat Tidak Wajar	4 3 2 1	Unqualified		4,00	Unqualified	4,00	4,00
10.	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun Terakhir	Tidak ada temuan Ditindaklanjuti Seluruhnya Selesai Ditindaklanjuti Sebahagian Selesai Tidak Ditindaklanjuti	4 3 2 1	Ditindaklanjuti Seluruhnya Selesai		3,00	Ditindaklanjuti Seluruhnya Selesai	3,00	3,00
	Jumlah Nilai yang di Peroleh					35,00			35,00
	NILAI KINERJA ASPEK ADMINISTRASI		35/36 x 15 =			14,58	35/36 x 15 =		14,58

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERUMDA AIR MINUM TIRTA KEPRI
Jl. MT. Haryono No. 87 Tanjungpinang Telp (0771) 21574

NERACA
Bulan Desember 2025
LAPORAN KONSOLIDASI

NAMA PERKIRAAN		BULAN INI	BULAN LALU	NAIK (TURUN) Jumlah	NAIK (TURUN) %
ASET					
ASET LANCAR					
KAS DAN BANK					
11.01.10	Kas Besar PDAM	83.560.050,00	146.122.948,00	(62.562.898,00)	(42,82)
11.01.20	Bank Riau 103.06.04070	74.857.226,00	74.657.835,00	199.391,00	0,27
11.01.21	BRI TPI 0174-01-000107-30-8	3.937.722.493,00	5.249.318.614,00	(1.311.596.121,00)	(24,99)
11.01.23	BRI Kijang 5566-01-000025-30-4	1.460.016,00	1.495.016,00	(35.000,00)	(2,34)
11.01.30	Bank Mandiri TPI 109.00.0617305.8	1.473.139.495,00	1.433.068.873,00	40.070.622,00	2,80
11.01.31	Bank Mandiri KC Tg. Uban 109-00-9705701-2	14.996.330,00	15.017.562,00	(21.232,00)	(0,14)
11.01.50	BNI TPI 0138270020	1.918.693.195,00	1.809.760.831,00	108.932.364,00	6,02
11.01.61	BNI Uban 0585687370	4.178.100,00	4.203.100,00	(25.000,00)	(0,59)
11.01.70	BPR Duta Kepri 01.8.000003.0	96.879.119,00	95.755.572,00	1.123.547,00	1,17
11.01.71	BPR Duta Kepri 01.8.000031.6	1.399.060.699,00	1.304.540.556,00	94.520.143,00	7,25
11.01.90	Bank Riau Kepri Syariah 82-10-30000-2	946.804.529,00	929.099.679,00	17.704.850,00	1,91
Jumlah Kas / Bank		*9.951.351.252,00*	*11.063.040.586,00*	*(1.111.689.334,00)*	*(10,05)*
11.02.10	Kas Kecil	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
Jumlah Kas Kecil		*3.750.000,00*	*3.750.000,00*	*0,00*	*0,00*
JUMLAH KAS DAN BANK		**9.955.101.252,00**	**11.066.790.586,00**	**(1.111.689.334,00)**	**(10,05)**
INVESTASI JANGKA PENDEK					
12.01.14	Deposito BRI 0174-01-002260-40-3	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
12.01.16	Deposito BRI 0174-01-002285-40-3	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
12.01.19	Deposito Bank Mandiri 109-02-0432395-0	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
12.01.20	Deposito Bank Mandiri 109-02-0432573-2	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
12.01.24	Deposito BPR Duta Kepri DB.01.3.013621.5	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
12.01.25	Deposito BPR Duta Kepri DB.01.3.013925.2	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
12.01.33	Deposito Bank Riau Kepri 10-33-10000-1	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
12.01.34	Deposito BPR Duta Kepri DB.01.3.018125.7	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah Deposito		*870.000.000,00*	*870.000.000,00*	*0,00*	*0,00*
JUMLAH INVESTASI JANGKA PENDEK		**870.000.000,00**	**870.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
PIUTANG USAHA					
13.01.11	Piutang Rek. Pelanggan Rumah Tangga	5.385.561.166,00	5.474.685.616,00	(89.124.450,00)	(1,63)
13.01.12	Piutang Rek. Pelanggan Instansi Pemerintah	1.172.485.450,00	1.138.642.250,00	33.843.200,00	2,97
13.01.21	Piutang Rek. Pelanggan Niaga Kecil	2.181.910.800,00	2.199.003.400,00	(17.092.600,00)	(0,78)
13.01.22	Piutang Rek. Pelanggan Niaga Besar	393.086.800,00	396.908.850,00	(3.822.050,00)	(0,96)
13.01.31	Piutang Rek. Pelanggan Industri	52.354.550,00	48.787.350,00	3.567.200,00	7,31
13.01.41	Piutang Rekening Pelanggan Sosial - Umum	13.676.400,00	13.387.400,00	289.000,00	2,16
13.01.42	Piutang Rekening Pelanggan Sosial - Khusus	147.116.050,00	153.528.100,00	(6.412.050,00)	(4,18)
13.01.51	Piutang Rek. Pelanggan Golongan Khusus	135.485.000,00	133.756.200,00	1.729.800,00	1,29
Jumlah Piutang Rekening Air		*9.481.676.216,00*	*9.558.698.166,00*	*(77.021.950,00)*	*(0,81)*
13.09.10	Penyisihan Piutang Rekening Air	(2.342.437.318,00)	(2.338.274.448,00)	(4.162.870,00)	0,18

NAMA PERKIRAAN		BULAN INI	BULAN LALU	NAIK (TURUN)	
				Jumlah	%
Jumlah Penyisihan Piutang Usaha		*(2.342.437.318,00)*	*(2.338.274.448,00)*	*(4.162.870,00)*	*0,18*
JUMLAH PIUTANG USAHA		**7.139.238.698,00**	**7.220.423.718,00**	**(81.184.820,00)**	**(1,12)**
PIUTANG LAIN-LAIN					
14.03.11	Piutang Pendapatan Bunga Deposito	14.217.100,00	14.217.100,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Pendapatan yang belum diterima		*14.217.100,00*	*14.217.100,00*	*0,00*	*0,00*
14.04.10	Piutang Pegawai	188.859.337,00	183.455.000,00	5.404.337,00	2,95
14.04.30	Piutang atas Sambungan Langganan Dinas	7.467.762,00	7.467.762,00	0,00	0,00
14.04.40	Piutang Jaminan Langganan	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Pegawai		*196.517.099,00*	*191.112.762,00*	*5.404.337,00*	*2,83*
JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN		**210.734.199,00**	**205.329.862,00**	**5.404.337,00**	**2,63**
PERSEDIAAN					
15.01.10	Persediaan Bahan Kimia	230.086.070,00	445.687.568,00	(215.601.498,00)	(48,38)
Jumlah Persediaan Bahan Operasi Kimia		*230.086.070,00*	*445.687.568,00*	*(215.601.498,00)*	*(48,38)*
15.03.10	Pipa-Pipa	120.387.100,00	98.989.100,00	21.398.000,00	21,62
15.03.20	Meter Air	320.203.240,00	417.061.840,00	(96.858.600,00)	(23,22)
15.03.40	Aksesories	243.519.234,00	260.530.464,00	(17.011.230,00)	(6,53)
15.03.80	Bahan Instalasi Lainnya	48.121.415,00	46.598.415,00	1.523.000,00	3,27
Jumlah PERSEDIAAN BAHAN INSTALASI		*732.210.989,00*	*823.159.819,00*	*(90.948.830,00)*	*(11,05)*
JUMLAH PERSEDIAAN		**962.297.059,00**	**1.268.847.387,00**	**(306.550.328,00)**	**(24,16)**
JUMLAH ASET LANCAR		**19.137.371.408,60**	**20.631.391.553,00**	**(1.494.020.145,00)**	**(7,24)**
ASET TETAP					
ASET TETAP PRODUKTIF					
31.01.10	Tanah dan Hak Atas Tanah	32.674.761.937,00	32.674.761.937,00	0,00	0,00
Jumlah Tanah Dan Penyempurnaan Tanah		*32.674.761.937,00*	*32.674.761.937,00*	*0,00*	*0,00*
31.03.10	Bangunan Dan Perbaikannya Instalasi Pompa	1.334.420.730,00	1.334.420.730,00	0,00	0,00
31.03.20	Pembangkit Tenaga Listrik	88.475.275,00	88.475.275,00	0,00	0,00
31.03.30	Peralatan Pompa	6.748.426.837,00	6.748.426.837,00	0,00	0,00
31.03.90	Instalasi Pompa Lainnya	19.256.000,00	19.256.000,00	0,00	0,00
Jumlah Instalasi Pompa		*8.190.578.842,00*	*8.190.578.842,00*	*0,00*	*0,00*
31.04.10	Bangunan Dan Perbaikannya Pengolahan Air	11.950.007.074,00	11.950.007.074,00	0,00	0,00
31.04.20	Alat-Alat Pengolahan Air	140.834.000,00	140.834.000,00	0,00	0,00
31.04.30	Reservoir/Penampungan Air	1.612.142.611,00	1.612.142.611,00	0,00	0,00
31.04.40	Pompa Pengolahan	189.975.500,00	189.975.500,00	0,00	0,00
31.04.50	Perpipaan dalam Instalasi	10.928.631.388,00	10.928.631.388,00	0,00	0,00
31.04.90	Instalasi Pengolahan Air Lainnya	9.734.421.457,00	9.734.421.457,00	0,00	0,00
Jumlah Instalasi Pengolahan Air		*34.556.012.030,00*	*34.556.012.030,00*	*0,00*	*0,00*
31.05.10	Bangunan Dan Perbaikannya Transmisi dan Distribusi	176.526.900,00	176.526.900,00	0,00	0,00
31.05.30	Pipa Transmisi	8.248.831.810,00	8.248.831.810,00	0,00	0,00
31.05.31	Pipa Distribusi	24.489.242.464,40	24.489.242.464,40	0,00	0,00
31.05.40	Pipa Dinas	14.700.262.789,00	14.610.191.639,00	90.071.130,00	0,62
31.05.50	Meter Air Yang Terpasang	2.278.667.795,00	2.278.667.795,00	0,00	0,00
31.05.60	Leding Umum	25.793.014,00	25.793.014,00	0,00	0,00
31.05.70	Saluran Air Pemadam Kebakaran	85.999.990,00	85.999.990,00	0,00	0,00
31.05.80	Jembatan Pipa	24.798.400,00	24.798.400,00	0,00	0,00
31.05.90	Instalasi Transmisi & Distribusi Lain	319.942.065,00	319.942.065,00	0,00	0,00
Jumlah Instalasi Transmisi Dan Distribusi		*50.350.065.207,40*	*50.260.014.077,40*	*90.071.130,00*	*0,18*
31.06.10	Bangunan Kantor	2.135.081.828,00	2.135.081.828,00	0,00	0,00
31.06.30	Bangunan Gedung Peralatan	640.048.525,00	640.048.525,00	0,00	0,00

NAMA PERKIRAAN		BULAN INI	BULAN LALU	NAIK (TURUN)	
				Jumlah	%
31.06.40	Bangunan Bengkel	995.775,00	995.775,00	0,00	0,00
31.06.90	Bangunan Rumah Dinas	1.354.501.465,00	1.354.501.465,00	0,00	0,00
Jumlah Bangunan / Gedung		*4.130.627.593,00*	*4.130.627.593,00*	*0,00*	*0,00*
31.07.10	Alat-Alat Pergudangan	3.408.000,00	3.408.000,00	0,00	0,00
31.07.20	Alat-Alat Laboratorium	272.891.036,00	272.891.036,00	0,00	0,00
31.07.30	Alat-Alat Perhubungan/Telekomunikasi	11.315.000,00	11.315.000,00	0,00	0,00
31.07.50	Alat-Alat Kerja/Bengkel	182.841.740,00	182.841.740,00	0,00	0,00
31.07.90	Rupa-Rupa Alat Dan Perlengkapan Lain	813.685.653,00	813.685.653,00	0,00	0,00
Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan		*1.284.141.429,00*	*1.284.141.429,00*	*0,00*	*0,00*
31.08.10	Kendaraan Roda 4 (empat)	637.527.165,00	637.527.165,00	0,00	0,00
31.08.20	Kendaraan Roda Dua	918.671.000,00	918.671.000,00	0,00	0,00
31.08.30	Kendaraan Penumpang	195.215.000,00	195.215.000,00	0,00	0,00
31.08.40	Kendaraan Angkut Material	230.043.600,00	230.043.600,00	0,00	0,00
Jumlah Kendaraan / Alat Pengangkutan		*1.981.456.765,00*	*1.981.456.765,00*	*0,00*	*0,00*
31.09.10	Meubelair Kantor	1.265.078.110,00	1.262.878.110,00	2.200.000,00	0,17
31.09.20	Mesin-Mesin Kantor	1.194.206.400,00	1.194.206.400,00	0,00	0,00
31.09.90	Rupa-Rupa Inventaris/Perabot Kantor Lain	1.135.211.980,00	1.133.361.980,00	1.850.000,00	0,16
Jumlah Inventaris / Perabot Kantor		*3.594.496.490,00*	*3.590.446.490,00*	*4.050.000,00*	*0,11*
31.10.20	Akumulasi Depresiasi Instalasi Pompa	(6.223.030.635,72)	(6.194.200.627,67)	(28.829.608,05)	0,47
31.10.30	Akumulasi Depresiasi Instalasi Pengolahan Air	(16.134.149.793,63)	(16.010.846.307,32)	(123.303.486,31)	0,77
31.10.40	Akumulasi Depresiasi Instalasi Transmisi dan Distribusi	(35.904.938.894,69)	(35.603.079.135,79)	(301.859.758,90)	0,85
31.10.50	Akumulasi Depresiasi Bangunan/Gedung	(1.853.897.952,26)	(1.846.259.776,14)	(7.638.176,12)	0,41
31.10.60	Akumulasi Depresiasi Peralatan dan Perlengkapan	(1.273.493.042,44)	(1.270.970.009,52)	(2.523.032,92)	0,20
31.10.70	Akumulasi Depresiasi Kendaraan/Alat Angkutan	(1.960.076.254,14)	(1.957.280.337,47)	(2.794.916,67)	0,14
31.10.80	Akumulasi Depresiasi Inventaris/Perabot Kantor	(3.442.614.433,16)	(3.428.450.060,22)	(14.164.372,94)	0,41
Jumlah Akumulasi Depresiasi		*(66.792.200.006,04)*	*(66.311.088.454,13)*	*(481.113.551,91)*	*0,73*
JUMLAH ASET TETAP PRODUKTIF		**69.969.960.287,36**	**70.356.952.709,27**	**(386.992.421,91)**	**(0,55)**
JUMLAH ASET TETAP		**69.969.960.287,36**	**70.356.952.709,27**	**(386.992.421,91)**	**(0,55)**
ASET TAK LANCAR LAINNYA					
ASET TAK BERWUJUD					
42.01.48	Beban Ditangguhkan Inventaris / Perabot Kantor	296.710.450,00	296.710.450,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Ditangguhkan		*296.710.450,00*	*296.710.450,00*	*0,00*	*0,00*
JUMLAH ASET TAK BERWUJUD		**296.710.450,00**	**296.710.450,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ASET TAK LANCAR LAINNYA		**296.710.450,00**	**296.710.450,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ASET		**89.494.042.145,36**	**91.285.054.712,27**	**(1.881.012.566,91)**	**(2,06)**
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
50.01.10	Utang Usaha	701.190.310,00	2.162.896.845,00	(1.461.706.535,00)	(67,58)
Jumlah Utang Usaha		*701.190.310,00*	*2.162.896.845,00*	*(1.461.706.535,00)*	*(67,58)*
50.02.10	Utang Non Usaha	0,00	322.700.192,00	(322.700.192,00)	(100,00)
Jumlah Utang Non Usaha		*0,00*	*322.700.192,00*	*(322.700.192,00)*	*(100,00)*
50.03.80	Tunjangan Yang Masih Harus Dibayar	144.547.000,00	0,00	144.547.000,00	-
50.03.81	Lembur Yang Masih Harus Dibayar	130.048.682,00	0,00	130.048.682,00	-
50.03.90	Biaya Yang Masih Harus Dibayar Lainnya	29.334.746,00	0,00	29.334.746,00	-
Jumlah Beban Yang Masih Harus Dibayar		*303.930.428,00*	*0,00*	*303.930.428,00*	-
50.09.10	Utang Iuran Pensiun	5.275.973.672,00	5.875.912.327,00	(599.938.655,00)	(10,21)
Jumlah Utang Iuran Pensiun		*5.275.973.672,00*	*5.875.912.327,00*	*(599.938.655,00)*	*(10,21)*

NAMA PERKIRAAN	BULAN INI	BULAN LALU	NAIK (TURUN)	
			Jumlah	%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	6.281.094.410,00	8.361.508.364,00	(2.080.413.954,00)	(24,88)
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	6.281.094.410,00	8.361.508.364,00	(2.080.413.954,00)	(24,88)
EKUITAS DAN CADANGAN				
EKUITAS DAN CADANGAN				
70.01.20 Kekayaan Asal Dana Pembangunan Daerah	6.267.483.109,00	6.267.483.109,00	0,00	0,00
Jumlah Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	*6.267.483.109,00*	*6.267.483.109,00*	*0,00*	*0,00*
70.02.20 Penyertaan Pemda Yang Belum Ditetapkan Statusnya	695.613.700,00	695.613.700,00	0,00	0,00
70.02.21 Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepri	68.945.676.816,00	68.945.676.816,00	0,00	0,00
Jumlah Penyertaan Pemerintah Pusat Dan Provinsi	*69.641.290.516,00*	*69.641.290.516,00*	*0,00*	*0,00*
70.03.11 Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan - Pemprov Kepri	27.932.528.914,00	27.932.528.914,00	0,00	0,00
70.03.12 Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan - Pemkab Kepri	1.682.138.710,00	1.682.138.710,00	0,00	0,00
Jumlah Modal	*29.614.667.624,00*	*29.614.667.624,00*	*0,00*	*0,00*
70.04.10 Modal Hibah	15.780.429.814,00	15.780.429.814,00	0,00	0,00
Jumlah Modal Hibah	*15.780.429.814,00*	*15.780.429.814,00*	*0,00*	*0,00*
70.07.10 Laba Ditahan (Akumulasi Kerugian)	(36.163.827.509,17)	(36.763.766.164,17)	599.938.655,00	(1,63)
Jumlah Laba Ditahan(akumulasi Kerugian)	*(36.163.827.509,17)*	*(36.763.766.164,17)*	*599.938.655,00*	*(1,63)*
70.09.10 Laba (Rugi) Periode Berjalan	(2.017.095.818,47)	(1.616.559.550,56)	(400.537.267,91)	24,78
Jumlah Laba (rugi) Periode Berjalan	*(2.017.095.818,47)*	*(1.616.559.550,56)*	*(400.537.267,91)*	*24,78*
JUMLAH EKUITAS DAN CADANGAN	83.122.947.735,36	82.923.546.348,27	199.401.387,09	0,24
JUMLAH EKUITAS DAN CADANGAN	83.122.947.735,36	82.923.546.348,27	199.401.387,09	0,24
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	89.404.042.145,36	91.285.054.712,27	(1.881.012.566,91)	(2,06)

Tanjungpinang, 05 Januari 2026

Mengetahui / Menyetujui,
Direktur

Ir. H. ABDUL KHOLIK FAJDAWANI, MM
NIK : –

Diperiksa Oleh,
Kabag Umum dan Keuangan

ADIK INDARISTORO, S.E
NIK : 020215

Dibuat Oleh :
Kasi Pembukuan dan Anggaran

SUTRISNO
NIK : 020126

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERUMDA AIR MINUM TIRTA KEPRI
Jl. MT. Haryono No. 87 Tanjungpinang Telp (0771) 21574

LAPORAN LABA-RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Bulan Desember 2025

BULAN INI				URAIAN		SAMPAI DENGAN BULAN INI			
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%			REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%
				PENDAPATAN USAHA					
				Pendapatan Penjualan Air					
2.660.955.500,00	4.295.359.000,00	(1.634.403.500,00)	(38,05)	81.01.10	Harga Air	30.889.485.800,00	36.878.541.500,00	(5.989.055.700,00)	(16,24)
36.181.500,00	38.335.500,00	(2.154.000,00)	(5,62)	81.01.20	Pendapatan Administrasi Rekening	427.156.500,00	441.231.000,00	(14.074.500,00)	(3,19)
243.430.000,00	255.570.000,00	(12.140.000,00)	(4,75)	81.01.30	Pendapatan Dana Meter	2.872.365.000,00	2.941.540.000,00	(69.175.000,00)	(2,35)
2.940.567.000,00	4.589.264.500,00	(1.648.697.500,00)	(35,93)	Jumlah Pendapatan Penjualan Air		34.189.007.300,00	40.261.312.500,00	(6.072.305.200,00)	(15,08)
				Pendapatan Non Air					
113.467.506,00	231.960.500,00	(118.492.994,00)	(51,08)	81.02.10	Pendapatan Sambungan Baru	1.174.606.358,00	2.777.952.200,00	(1.603.345.842,00)	(57,72)
12.700.000,00	24.550.000,00	(11.850.000,00)	(48,27)	81.02.21	Jaminan Langganan	122.250.000,00	294.550.000,00	(172.300.000,00)	(58,50)
9.400.000,00	16.800.000,00	(7.400.000,00)	(44,05)	81.02.40	Pendapatan Penyambungan Kembali	130.800.000,00	201.600.000,00	(70.800.000,00)	(35,12)
62.833.500,00	74.300.000,00	(11.466.500,00)	(15,43)	81.02.50	Pendapatan Denda	768.834.500,00	891.600.000,00	(122.765.500,00)	(13,77)
160.000,00	240.000,00	(80.000,00)	(33,33)	81.02.51	Pendapatan Balik Nama	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00
0,00	4.192.500,00	(4.192.500,00)	(100,00)	81.02.52	Pendapatan Denda Pelanggaran	29.320.000,00	51.707.500,00	(22.387.500,00)	(43,30)
120.000,00	40.000,00	80.000,00	200,00	81.02.60	Pendapatan Pemeriksaan Instalasi Pelanggan	570.000,00	500.000,00	70.000,00	14,00
0,00	2.640.000,00	(2.640.000,00)	(100,00)	81.02.70	Pendapatan Penggantian Meter Rusak	14.520.000,00	28.710.000,00	(14.190.000,00)	(49,43)
9.026.529,00	4.000.000,00	5.026.529,00	125,66	81.02.95	Pendapatan Non Air Lainnya - Pipa Distribusi	280.648.968,00	48.000.000,00	232.648.968,00	484,69
7.773.360,00	13.500.000,00	(5.726.640,00)	(42,42)	81.02.96	Pendapatan Non Air Lain-lain	70.756.711,00	162.000.000,00	(91.240.289,00)	(56,32)
214.980.985,00	372.223.000,00	(157.242.015,00)	(42,24)	Jumlah Pendapatan Non Air		2.595.626.537,00	4.460.139.700,00	(1.864.313.163,00)	(41,80)
3.155.547.985,00	4.961.487.500,00	(1.805.939.515,00)	(36,40)	Jumlah Pendapatan Usaha		36.784.633.837,00	44.721.452.200,00	(7.936.618.363,00)	(17,75)
3.155.547.985,00	**4.961.487.500,00**	**(1.805.939.515,00)**	**(36,40)**	**JUMLAH PENDAPATAN USAHA**		**36.784.633.837,00**	**44.721.452.200,00**	**(7.936.618.363,00)**	**(17,75)**
				BEBAN LANGSUNG USAHA					
				Beban Operasional Sumber					
0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)	91.01.90	Rupa-rupa Beban Operasi Sumber Air	6.320.000,00	600.000.000,00	(593.680.000,00)	(98,95)
0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Jumlah Beban Operasional Sumber		6.320.000,00	600.000.000,00	(593.680.000,00)	(98,95)
				Beban Pemeliharaan Sumber					
0,00	250.000,00	(250.000,00)	(100,00)	91.02.40	Pemeliharaan Mata Air Dan Saluran	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
0,00	250.000,00	(250.000,00)	(100,00)	Jumlah Beban Pemeliharaan Sumber		0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)

BULAN INI				URAIAN		SAMPAI DENGAN BULAN INI			
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%			REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%
0,00	50.250.000,00	(50.250.000,00)	(100,00)	Jumlah Beban Sumber Air		6.320.000,00	603.000.000,00	(596.680.000,00)	(98,95)
				Beban Operasional Pengolahan Air					
164.916.800,00	166.850.000,00	(1.933.200,00)	(1,16)	92.01.10	Gaji Dan Honor Pengolahan Air	1.931.050.036,00	2.002.200.000,00	(71.149.964,00)	(3,55)
48.469.200,00	49.900.000,00	(1.430.800,00)	(2,87)	92.01.11	Tunjangan-tunjangan Pengolahan Air	598.996.500,00	599.800.000,00	(1.803.500,00)	(0,30)
41.097.613,00	71.750.000,00	(30.652.387,00)	(42,72)	92.01.13	Lembur Pengolahan Air	546.509.900,00	861.000.000,00	(314.490.100,00)	(36,53)
215.601.498,00	125.085.000,00	90.516.498,00	72,36	92.01.20	Pemakaian Bahan Kimia	2.245.751.700,00	1.501.020.000,00	744.731.700,00	49,62
0,00	500.000,00	(500.000,00)	(100,00)	92.01.40	Beban Bahan Bakar Pengolahan	0,00	3.200.000,00	(3.200.000,00)	(100,00)
569.096.725,00	663.385.700,00	(94.288.975,00)	(14,21)	92.01.50	Beban Listrik Pln Pengolahan	7.139.368.541,00	7.960.628.400,00	(821.259.859,00)	(10,32)
1.039.183.836,00	1.077.470.700,00	(38.286.864,00)	(3,55)	Jumlah Beban Operasional Pengolahan Air		12.459.676.677,00	12.928.848.400,00	(467.171.723,00)	(3,61)
				Beban Pemeliharaan Pengolahan Air					
0,00	6.530.000,00	(6.530.000,00)	(100,00)	92.02.10	Pemeliharaan Bangunan Pengolahan	8.490.000,00	78.360.000,00	(69.870.000,00)	(89,17)
6.826.000,00	14.550.000,00	(7.724.000,00)	(53,09)	92.02.20	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan	220.360.500,00	211.605.000,00	8.755.500,00	4,14
26.958.000,00	17.850.000,00	9.108.000,00	51,03	92.02.30	Pemeliharaan Instalasi Pompa Pengolahan	141.554.229,00	214.200.000,00	(72.645.771,00)	(33,91)
29.521.030,00	13.530.000,00	15.991.030,00	118,19	92.02.90	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lainnya	160.921.148,00	152.360.000,00	(1.438.852,00)	(0,89)
63.305.030,00	52.460.000,00	10.845.030,00	20,67	Jumlah Beban Pemeliharaan Pengolahan Air		531.325.877,00	656.525.000,00	(125.199.123,00)	(20,76)
				Beban Depresiasi Pengolahan Air					
26.828.806,05	22.600.000,00	6.228.806,05	27,57	92.09.10	Beban Depresiasi Instalasi Pompa	265.811.400,05	271.200.000,00	(5.388.599,95)	(1,99)
123.303.486,31	125.500.000,00	(2.196.513,69)	(1,75)	92.09.20	Beban Depresiasi Instalasi Pengolahan Air	1.492.380.429,40	1.506.000.000,00	(13.619.570,60)	(0,90)
152.133.294,36	148.100.000,00	4.033.294,36	2,72	Jumlah Beban Depresiasi Pengolahan Air		1.758.191.829,45	1.777.200.000,00	(19.008.170,55)	(1,07)
1.254.622.160,36	1.278.030.700,00	(23.408.539,64)	(1,83)	Jumlah Beban Pengolahan Air		14.749.194.383,45	15.370.573.400,00	(621.379.016,55)	(4,04)
				Beban Operasional Transmisi & Distribusi					
74.348.865,00	86.600.000,00	(12.251.065,00)	(14,15)	93.01.10	Gaji Dan Honor Transfer	866.993.910,00	1.039.200.000,00	(172.206.090,00)	(16,57)
17.213.000,00	22.150.000,00	(4.937.000,00)	(22,29)	93.01.11	Tunjangan-tunjangan Transfer	216.507.000,00	265.800.000,00	(49.293.000,00)	(18,55)
15.180.879,00	31.300.000,00	(16.119.121,00)	(51,50)	93.01.15	Lembur Transfer	170.618.468,00	375.600.000,00	(204.781.532,00)	(54,52)
8.592.312,00	5.702.800,00	2.889.512,00	50,67	93.01.40	Beban Listrik Transfer	83.155.696,00	68.433.600,00	14.722.096,00	21,51
115.335.186,00	145.752.800,00	(30.417.614,00)	(20,87)	Jumlah Beban Operasional Transmisi & Distribusi		1.337.475.074,00	1.749.033.600,00	(411.558.526,00)	(23,53)
				Beban Pemeliharaan Transmisi & Distribusi					
0,00	200.000,00	(200.000,00)	(100,00)	93.02.10	Pemel.bangunan Instl.& Penyimpanan	0,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	(100,00)
38.131.698,00	15.800.000,00	22.331.698,00	141,34	93.02.30	Pemel.pipa Transmisi	137.904.670,00	189.600.000,00	(51.695.330,00)	(27,27)
135.447.056,00	167.662.500,00	(32.215.444,00)	(19,21)	93.02.40	Pemeliharaan Pipa Dinas	1.718.809.271,00	2.021.150.000,00	(302.340.729,00)	(14,96)
0,00	250.000,00	(250.000,00)	(100,00)	93.02.51	Pemel. Pompa Distribusi	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
8.824.700,00	7.250.000,00	1.574.700,00	21,72	93.02.90	Pemel.transmisi Dan Distribusi Lainnya	61.965.291,00	87.000.000,00	(25.034.709,00)	(28,78)
182.403.454,00	191.162.500,00	(8.758.846,00)	(4,58)	Jumlah Beban Pemeliharaan Transmisi & Distribusi		1.918.679.232,00	2.302.150.000,00	(383.470.768,00)	(16,66)

BULAN INI				URAIAN		SAMPAI DENGAN BULAN INI			
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%			REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%
				Beban Depresiasi Transmisi & Distribusi					
301.859.758,90	332.500.000,00	(30.640.241,10)	(9,22)	93.09.10	Beban Depresiasi Transmisi Dan Distribusi	3.686.614.040,09	3.990.000.000,00	(303.385.959,91)	(7,60)
301.859.758,90	332.500.000,00	(30.640.241,10)	(9,22)	Jumlah Beban Depresiasi Transmisi & Distribusi		3.686.614.040,09	3.990.000.000,00	(303.385.959,91)	(7,60)
599.556.509,90	668.415.300,00	(68.858.701,10)	(10,43)	Jumlah Beban Transmisi & Distribusi		6.942.768.345,09	8.042.183.600,00	(1.099.415.253,91)	(13,67)
1.854.220.768,36	**1.997.096.000,00**	**(142.875.240,74)**	**(7,16)**	**JUMLAH BEBAN LANGSUNG USAHA**		**21.698.282.729,54**	**24.015.767.000,00**	**(2.317.474.270,46)**	**(9,65)**
1.301.327.225,74	**2.963.791.500,00**	**(1.662.464.274,26)**	**(56,09)**	**LABA (RUGI) KOTOR USAHA**		**15.086.551.107,46**	**20.785.695.200,00**	**(5.619.144.092,54)**	**(27,14)**
				BEBAN TIDAK LANGSUNG USAHA					
				Beban Pegawai Umum & Administrasi					
377.224.695,00	349.654.000,00	27.570.695,00	7,89	96.01.10	Gaji Dan Honor Umum Dan Administrasi	4.211.575.156,00	4.196.848.000,00	15.727.156,00	0,37
110.673.500,00	106.500.000,00	4.173.500,00	3,92	96.01.20	Tunjangan-tunjangan Umum Dan Administrasi	1.290.307.500,00	1.278.000.000,00	12.307.500,00	0,96
173.488.665,00	225.000.000,00	(51.511.335,00)	(22,89)	96.01.30	Iuran Pensiun Umum Dan Administrasi	1.965.660.456,00	2.700.000.000,00	(734.339.544,00)	(27,20)
73.770.190,00	73.200.000,00	570.190,00	0,78	96.01.40	Lembur Umum Dan Administrasi	822.469.567,00	878.400.000,00	(55.930.433,00)	(6,37)
194.001.900,00	630.604.000,00	(436.602.100,00)	(69,24)	96.01.41	Incentive Karyawan Umum & Adm.	1.828.768.290,00	2.425.312.000,00	(596.543.710,00)	(24,60)
900.000,00	104.850.000,00	(103.950.000,00)	(99,14)	96.01.60	Pakaian Dinas/pembinaan Pegawai Umum & Adm	101.995.000,00	392.200.000,00	(290.205.000,00)	(73,99)
0,00	200.000,00	(200.000,00)	(100,00)	96.01.70	Bantuan Dan Sumbangan	0,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	(100,00)
0,00	28.000.000,00	(28.000.000,00)	(100,00)	96.01.80	Pendidikan Dan Latihan	42.922.500,00	312.000.000,00	(269.077.500,00)	(86,24)
930.058.950,00	1.516.008.000,00	(585.949.050,00)	(38,65)	Jumlah Beban Pegawai Umum & Administrasi		10.263.608.469,00	12.184.160.000,00	(1.920.461.531,00)	(15,76)
				Beban Kantor					
6.944.650,00	7.750.000,00	(805.350,00)	(10,39)	96.02.10	Beban Atk Dan Foto Copy	109.801.350,00	93.000.000,00	16.801.350,00	18,07
5.250.000,00	1.210.000,00	4.040.000,00	333,88	96.02.20	Barang-barang Cetakan	25.022.500,00	14.520.000,00	10.502.500,00	72,33
5.655.000,00	3.900.000,00	1.755.000,00	29,62	96.02.30	Perlengkapan Komputer	70.609.296,00	46.800.000,00	23.809.296,00	50,87
6.729.610,00	5.300.000,00	1.429.610,00	26,97	96.02.40	Beban Telepon/telex/telegraph/faximile/internet	79.829.676,00	63.600.000,00	16.229.676,00	25,52
16.534.834,00	11.860.000,00	5.074.834,00	42,79	96.02.50	Beban Tarra / Rugi	147.489.325,00	142.320.000,00	5.169.325,00	3,63
325.000,00	560.000,00	(235.000,00)	(41,96)	96.02.60	Benda Pos Dan Meterai	5.089.000,00	6.720.000,00	(1.631.000,00)	(24,27)
11.466.734,00	13.497.900,00	(2.031.166,00)	(15,05)	96.02.70	Beban Listrik / Penerangan	142.072.232,00	161.974.800,00	(19.902.568,00)	(12,29)
2.200.800,00	3.700.000,00	(1.500.000,00)	(40,54)	96.02.80	Beban Cleaning Service	26.400.000,00	44.400.000,00	(18.000.000,00)	(40,54)
54.905.828,00	47.777.900,00	7.127.928,00	14,92	Jumlah Beban Kantor		606.313.381,00	573.334.800,00	32.978.581,00	5,75
				Beban Hubungan Langganan					
0,00	0,00	0,00	-	96.03.30	Beban Penagihan Rekening	8.421.375,00	0,00	8.421.375,00	-
0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)	96.03.90	Rupa-rupa Beban Urusan Langganan	4.509.932,00	18.000.000,00	(13.490.068,00)	(74,94)
0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Jumlah Beban Hubungan Langganan		12.931.307,00	18.000.000,00	(5.068.693,00)	(28,16)
				Beban Pemeliharaan Umum & Adm					
1.539.500,00	1.690.000,00	(150.500,00)	(8,91)	96.05.10	Pemeliharaan Inventaris Kantor	11.913.200,00	20.280.000,00	(8.366.800,00)	(41,26)

BULAN INI				URAIAN		SAMPAI DENGAN BULAN INI			
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%			REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%
16.763.000,00	21.900.000,00	(3.137.000,00)	(14,32)	96.06.20	Pemeliharaan Kendaraan	240.455.352,00	262.800.000,00	(22.344.648,00)	(8,50)
9.132.000,00	10.150.000,00	(1.018.000,00)	(10,03)	96.06.30	Pemeliharaan Gedung Kantor	66.130.200,00	186.035.000,00	(119.904.800,00)	(64,45)
0,00	1.150.000,00	(1.150.000,00)	(100,00)	96.06.60	Pemeliharaan Instalasi Listrik	3.046.500,00	13.800.000,00	(10.753.500,00)	(77,92)
29.434.500,00	34.890.000,00	(5.455.500,00)	(15,64)	Jumlah Beban Pemeliharaan Umum & Adm		321.546.252,00	462.015.000,00	(140.469.748,00)	(30,42)
				Beban Penghapusan Piutang					
4.162.870,00	10.000.000,00	(5.837.130,00)	(58,37)	96.07.10	Beban Penyisihan Piutang Air	81.533.405,00	120.000.000,00	(38.466.595,00)	(32,06)
4.162.870,00	10.000.000,00	(5.837.130,00)	(58,37)	Jumlah Beban Penghapusan Piutang		81.533.405,00	120.000.000,00	(38.466.595,00)	(32,06)
				Rupa-rupa Beban Umum					
837.000,00	740.000,00	97.000,00	13,11	96.08.11	Beban tanah/bangunan	7.965.500,00	8.880.000,00	(914.500,00)	(10,30)
8.425.000,00	9.000.000,00	(575.000,00)	(6,39)	96.08.20	Beban Dewan Pengawas	83.775.000,00	108.000.000,00	(24.225.000,00)	(22,43)
1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	96.08.22	Beban Operasional Dewan Pengawas	9.000.000,00	14.000.000,00	(5.000.000,00)	(35,71)
8.730.263,00	2.000.000,00	6.730.263,00	336,51	96.08.25	Perjalanan Dinas Dewan Pengawas	27.547.403,00	28.000.000,00	(452.597,00)	(1,62)
69.403.611,00	51.700.000,00	17.703.611,00	34,24	96.08.30	Beban Perjalanan Dinas	572.516.516,00	620.400.000,00	(47.883.484,00)	(7,72)
0,00	0,00	0,00	-	96.08.41	Beban Jasa Manajemen	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
0,00	0,00	0,00	-	96.08.42	Beban Bantuan Hukum	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
0,00	0,00	0,00	-	96.08.43	Beban Audit	46.000.000,00	70.000.000,00	(24.000.000,00)	(34,29)
14.300.000,00	16.000.400,00	(1.700.000,00)	(10,63)	96.08.44	Beban Representatif	171.600.000,00	192.000.000,00	(20.400.000,00)	(10,63)
176.388.380,00	26.000.000,00	150.388.380,00	578,80	96.08.50	Beban Sewa	1.220.226.232,00	312.000.000,00	908.226.232,00	291,10
70.805.214,00	65.000.000,00	5.805.214,00	8,93	96.08.60	Beban Asuransi	818.876.097,00	780.000.000,00	38.876.097,00	4,98
37.780.000,00	42.000.000,00	(4.220.000,00)	(10,05)	96.08.61	Beban Keamanan	453.360.006,00	504.000.000,00	(50.639.994,00)	(10,05)
0,00	200.000,00	(200.000,00)	(100,00)	96.08.70	Beban Pbb	4.557.886,00	5.900.000,00	(1.342.114,00)	(22,75)
1.903.468,00	60.150.000,00	(58.246.532,00)	(96,84)	96.08.71	Beban Pajak-pajak	67.737.978,00	721.800.000,00	(654.062.022,00)	(90,62)
275.306.451,00	152.000.000,00	123.306.451,00	81,12	96.08.90	Beban Umum Lain-lain (non Sumbangan)	2.115.319.453,00	2.060.500.000,00	54.819.453,00	2,66
664.979.387,00	425.790.000,00	239.189.387,00	56,18	Jumlah Rupa-rupa Beban Umum		5.598.482.071,00	5.440.480.000,00	158.002.071,00	2,90
				Beban Depresiasi					
7.638.176,12	7.600.000,00	38.176,12	0,50	96.09.50	Beban Depresiasi Bangunan Kantor	91.697.696,74	91.200.000,00	497.696,74	0,55
2.523.032,92	3.500.000,00	(976.967,08)	(27,91)	96.09.60	Beban Depresiasi Alat-alat Kantor	34.676.241,49	42.000.000,00	(7.323.758,51)	(17,44)
2.794.910,67	5.200.000,00	(2.405.089,33)	(46,25)	96.09.70	Beban Depresiasi Kendaraan/alat Angkut	34.305.579,84	62.400.000,00	(28.094.420,16)	(45,02)
14.164.372,94	13.100.000,00	1.064.372,94	8,12	96.09.80	Beban Depresiasi Inventaris/perabot Kantor	147.771.604,88	157.200.000,00	(9.428.395,14)	(6,00)
27.120.498,65	29.400.000,00	(2.279.501,35)	(7,75)	Jumlah Beban Depresiasi		308.451.122,93	352.800.000,00	(44.348.877,07)	(12,57)
1.710.662.033,65	2.065.365.990,00	(354.703.866,35)	(17,17)	Jumlah Beban Umum & Administrasi		17.192.955.607,93	19.171.689.800,00	(1.978.734.792,07)	(10,32)
1.710.662.033,65	2.065.365.990,00	(354.703.866,35)	(17,17)	JUMLAH BEBAN TIDAK LANGSUNG USAHA		17.192.955.607,93	19.171.689.800,00	(1.978.734.792,07)	(10,32)
(409.334.867,91)	898.425.630,00	(1.307.760.497,91)	(145,56)	LABA (RUGI) USAHA		(2.196.463.900,47)	1.534.005.480,00	(3.640.469.380,47)	(237,31)

BULAN INI				URAIAN		SAMPAI DENGAN BULAN INI			
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%			REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%
				PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN					
				Pendapatan Lain-lain					
1.943.143,00	3.000.000,00	(1.056.857,00)	(35,23)	88.01.10	Pendapatan Bunga Deposito	25.105.653,00	36.000.000,00	(10.894.347,00)	(30,26)
12.648.596,00	10.005.000,00	2.643.596,00	26,42	88.01.20	Pendapatan Jasa Giro / Bunga Tabungan	138.665.693,00	120.060.000,00	18.605.693,00	15,50
14.591.739,00	13.005.000,00	1.586.739,00	12,20	Jumlah Pendapatan Lain-lain		163.771.346,00	156.060.000,00	7.711.346,00	4,94
14.591.739,00	13.005.000,00	1.586.739,00	12,20	Jumlah Pendapatan Diluar Usaha		163.771.346,00	156.060.000,00	7.711.346,00	4,94
				Beban Lain-lain					
(2.644.719,00)	(325.000,00)	(2.319.719,00)	713,76	98.01.10	Beban Bank	(13.109.337,00)	(3.900.000,00)	(9.209.337,00)	237,68
(3.149.480,00)	(3.050.000,00)	(99.480,00)	3,26	98.01.91	Beban Administasi Cekli	61.293.927,00)	(36.600.000,00)	(24.693.927,00)	67,47
(5.794.199,00)	(3.375.000,00)	(2.419.199,00)	71,68	Jumlah Beban Lain-lain		(74.403.264,00)	(40.500.000,00)	(33.903.264,00)	83,66
(5.794.199,00)	(3.375.000,00)	(2.419.199,00)	71,68	Jumlah Beban Diluar Usaha		(74.403.264,00)	(40.500.000,00)	(33.903.264,00)	83,66
8.797.540,00	9.630.000,00	(832.460,00)	(8,64)	JUMLAH PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		89.368.082,00	115.560.000,00	(26.251.918,00)	(22,72)
(400.537.267,91)	908.055.600,00	(1.308.592.867,91)	(144,11)	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(2.017.695.818,47)	1.649.565.409,00	(3.666.661.218,47)	(222,28)
				Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain					
0,00	0,00	0,00	-	99.01.10	Surplus Revaluasi Aset	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	0,00	-	99.01.20	Keuntungan Dan Kerugian Aktuarial	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	0,00	-	99.01.30	Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	0,00	-	99.01.40	Keuntungan Dan Kerugian Pengukuran Kembali Aset Keuangan	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	0,00	-	99.01.50	Keuntungan Dan Kerugian Instrumen Lindung Nilai	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	0,00	-	Jumlah Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain		0,00	0,00	0,00	-
(400.537.267,91)	908.055.600,00	(1.308.592.867,91)	(144,11)	JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(2.017.695.818,47)	1.649.565.409,00	(3.666.661.218,47)	(222,28)

Tanjungpinang, 05 Januari 2026

Mengetahui:
Direktur

Ir. H. ABDUL MUHIS, IKTAJDAWATI, MM
NIK : -

Diperiksa Oleh
Kabag Umum dan Keuangan

ADIK INDARISTORO, S.E
NIK : 020215

Disusun Oleh
Kasi Pembukuan dan Anggaran

SUTRISNO
NIK : 020128

PERUMDA AIR MINUM TIRTA KEPRI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
dan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDENT

PERUMDA AIR MINUM KEPRI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	-
Laporan Auditor Independen	-
Neraca Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	1
Laporan Laba (Rugi) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	2
Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	3
Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	4
Catatan atas Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	5 - 18

Lampiran :
Lampiran 1 : Perhitungan Penyisihan Piutang
Lampiran 2 : Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutannya

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KEPRI
Jl. MT.Haryono No.87, Tanjungpinang – Kepulauan Riau
Telp.(0771) 21574, Fax. (0771) 21366 Email:. perumda@tirtakepri.co.id
TIRTA KEPRI

SURAT PERNYATAAN PENGURUS

TENTANG

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

PERUMDA AIR MINUM TIRTA KEPRI

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

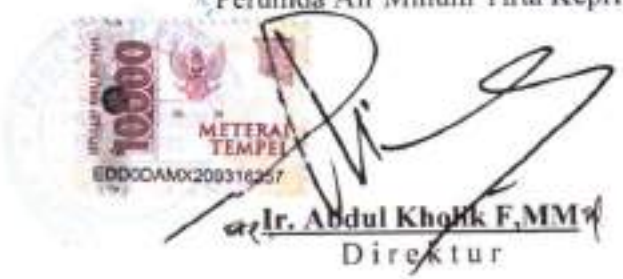
Nama	: Ir. Abdul Kholik F,MM
Alamat kantor	: Jl. M.T. Haryono No.87, Tanjungpinang-Kepulauan Riau
Nomor Telp	: 081382863761
Jabatan	: Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Kepri;
2. Laporan keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Kepri telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia;
3. a. Seluruh informasi dalam laporan keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Kepri telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Seluruh Informasi dalam Laporan keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Kepri tidak mengandung informasi atau fakta material tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern pada PERUMDA Air Minum Tirta Kepri.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tanjungpinang, 30 April 2025
Hormat Kami,
Perumda Air Minum Tirta Kepri



Ir. Abdul Kholik F,MM
Direktur

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
HARYONO, JUNANTO dan ANWAR
No. Izin : 469/KM.1/2024

No. : 00146/2.1465/AU.2/05/1310-3/1/IV/2025

Kepada Yth.
Dewan Pengurus dan Pengawas
PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)
AIR MINUM TIRTA KEPRI

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) AIR MINUM TIRTA KEPRI** ("Perusahaan"), yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan.

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
HARYONO JUNIANTO & ANWAR

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Kantor Akuntan Publik
Haryono, Junianto dan Anwar

00146

Syaiful Anwar, CPA
Nomor Izin Akuntan Publik : AP.1310

30 April 2025

PERUMDA AIR MINUM TIRTA KEPRI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NERACA
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	*2b , 3.*	9.022.458.379	8.350.775.597
Piutang Usaha Bersih	*2c , 4.*	6.882.982.634	6.584.721.825
Piutang Lain - lain	*2f , 5.*	214.294.862	133.874.862
Persediaan	*2d , 6.*	1.180.261.059	833.078.625
Jumlah Aset Lancar		**17.299.996.934**	**15.902.450.909**
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	*2e,7*	134.830.290.958	133.685.822.054
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(61.038.943.014)	(54.895.098.440)
Aset Tidak Berwujud/beban ditangguhkan	*2h,8*	296.710.450	179.536.950
Jumlah Aset Tidak Lancar		**74.088.058.395**	**78.970.260.564**
JUMLAH ASET		**91.388.055.329**	**94.872.711.474**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Usaha	*9*	700.088.110	1.037.816.741
Beban Yang Masih Harus Dibayar	*8*	271.949.993	296.322.148
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**972.038.103**	**1.334.138.889**
Liabilitas Jangka Panjang			
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	*11*	1.521.926.069	884.231.921
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**1.521.926.069**	**884.231.921**
Jumlah Liabilitas		**2.493.964.172**	**2.218.370.810**
Ekuitas			
Modal Dasar	*12*	121.303.871.063	121.303.871.063
Laba (Rugi) Ditahan	*16*	(29.287.224.547)	(26.400.471.203)
Laba (Rugi) Periode Berjalan	*16*	(3.122.555.359)	(2.249.059.197)
Jumlah Ekuitas		**88.894.091.157**	**92.654.340.663**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas		**91.388.055.329**	**94.872.711.474**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan secara keseluruhan

PERUMDA AIR MINUM TIRTA KEPRI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN LABA (RUGI)
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
Pendapatan Operasional	*2g*		
Pendapatan Penjualan Air	*17*	32.299.310.450	29.767.237.450
Pendapatan Non Air	*18*	2.011.876.303	2.528.932.335
Jumlah Pendapatan Operasional		**34.311.186.753**	**32.296.169.785**
Beban Operasional	*2g,19*		
Beban Operasional		31.387.662.210	28.403.910.194
Beban Penyusutan dan Amortisasi		6.143.844.574	6.211.719.079
Jumlah Harga Pokok Penjualan		**37.531.506.784**	**34.615.629.273**
Laba Kotor Operasional		**(3.220.320.031)**	**(2.319.459.488)**
Pendapatan (beban) Non Operasional	*2g,20*		
Pendapatan Non Operasional		142.447.897	108.569.928
Beban Non Operasional		(44.683.225)	(38.169.637)
Jumlah Pendapatan Non Operasional		**97.764.672**	**70.400.291**
Laba Usaha Sebelum Pajak		**(3.122.555.359)**	**(2.249.059.197)**
PPh Badan		-	-
Laba Bersih		**(3.122.555.359)**	**(2.249.059.197)**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan secara keseluruhan

PERUMDA AIR MINUM TIRTA KEPRI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Kekayaan Asal Dana Pembangunan Daerah	Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	Hibah	Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya	Saldo Laba Ditahan (Akumulasi Rugi)	Jumlah Ekuitas
Saldo per 31 Desember 2023	627.736.733	104.200.090.816	15.780.429.814	695.613.700	(26.772.305.949)	94.531.565.114
Koreksi Laba Ditahan	-	-	-	-	371.834.746	371.834.746
Laba Tahun 2023	-	-	-	-	(2.249.059.197)	(2.249.059.197)
Saldo per 31 Desember 2023	**627.736.733**	**104.200.090.816**	**15.780.429.814**	**695.613.700**	**(28.649.530.400)**	**92.654.340.663**
Penambahan Modal Berupa Aset	-		-	-	-	-
Koreksi Laba Ditahan					(637.694.147)	(637.694.147)
Rugi Tahun Berjalan 2024	-	-	-	-	(3.122.555.359)	(3.122.555.359)
Saldo per 31 Desember 2024	**627.736.733**	**104.200.090.816**	**15.780.429.814**	**695.613.700**	**(32.409.779.906)**	**88.894.091.157**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan secara keseluruhan

PERUMDA AIR MINUM TIRTA KEPRI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Rugi Bersih	(3.122.555.359)	(2.249.059.197)
Ditambah Transaksi Non Kas		
- Beban Penyisihan Piutang	119.550.572	154.034.748
- Beban Penyusutan Aset Tetap	6.143.844.574	6.211.719.078
Laba Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	**3.140.839.786**	**4.116.694.629**
Penurunan/(Kenaikan) dalam Asset Lancar		
- Penurunan/(Kenaikan) Piutang Usaha	(417.811.381)	(619.565.150)
- Penurunan/(Kenaikan) Piutang Lain lain	(80.420.000)	25.500.000
- Penurunan/(Kenaikan) Persediaan	(347.182.434)	277.381.910
Jumlah (Kenaikan) / Penurunan dalam Asset Lancar	**(845.413.815)**	**(316.683.240)**
Kenaikan / (Penurunan) dalam Kewajiban Jangka Pendek		
- Kenaikan / (Penurunan) Utang Usaha	(337.728.631)	465.320.661
- Kenaikan / (Penurunan) Beban Yang masih Harus Dibayar	(24.372.155)	(41.200.317)
- Kenaikan / (Penurunan) Utang Imbalan Pasca Kerja	637.694.148	(371.834.747)
Jumlah Kenaikan / (Penurunan) dlm Kewajiban Jangka Pendek	**275.593.362**	**52.285.597**
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**2.571.019.333**	**3.852.296.986**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Kenaikan / (Penurunan) Asset Tetap		
- Penambahan Tanah	-	-
- Pembelian Instalasi Pompa dan Pengolahan	(420.950.882)	(599.560.750)
- Pembelian Instalasi Transmisi dan Distribusi	(423.338.022)	(1.000.476.889)
- Pembelian Peralatan Perlengkapan	(40.800.000)	(17.700.000)
- Pembelian Kendaraan / Alat Pengangkutan	-	-
- Penambahan Bangunan	-	(119.254.000)
- Pembelian Inventaris / Perabot Kantor	(259.380.000)	(81.260.000)
- Aset tidak berwujud/beban ditangguhkan	(117.173.500)	(42.586.950)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	**(1.261.642.404)**	**(1.860.838.589)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
- Kenaikan / (Penurunan) Ekuitas	(637.694.147)	371.834.746
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	**(637.694.147)**	**371.834.746**
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	671.682.782	2.363.293.143
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	8.350.775.597	5.987.482.453
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIT TAHUN	**9.022.458.379**	**8.350.775.597**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan secara keseluruhan

PERUMDA AIR MINUM TIRTA KEPRI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri Provinsi Kepulauan Riau adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum dan berkedudukan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang berkantor pusat di Tanjungpinang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1976 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Dati I Riau Nomor 2 Tahun 1988 sebagai salah satu unit dari Perumda Air Minum Provinsi Riau. Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1976 sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Dati II Riau tersebut, maksud dan tujuan dari pendirian Perumda Air Minum Tirta Kepri Provinsi Kepulauan Riau adalah bergerak dalam bidang pelayanan penyediaan air bersih dan air minum yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat.

Anggaran Dasar Perusahaan yang terdapat di Akta Pendirian tersebut telah mengalami perubahan yang dinyatakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2020, yang menyatakan perubahan bentuk hukum dari perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah.

b. Susunan Pengurus

Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Kepri Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 913 Tahun 2023 Tanggal 14 Agustus 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Kepri.

Direktur Perumda Air Minum Tirta Kepri Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 236 Tahun 2024 Tanggal 30 Januari 2024 Tentang Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri Periode 2024-2029. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri Provinsi Kepulauan Riau, pengangkatan Direktur dilakukan setelah melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan.

Susunan Pengurus Perumda Air Minum Tirta Kerpi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Dewan Pengawas	: SYAKYAKIRTI, S.E., M.M., M.H
Direktur	: Ir. ABDUL KHOLIK FAJDAWANI, MM

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Perusahaan menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu laporan keuangan tahun 2024 dan 2023 disajikan berdasarkan SAK ETAP.

Mata uang pelaporan yang di gunakan entitas adalah mata uang Rupiah. Mata uang Rupiah di gunakan karena memenuhi indikator sebagai mata uang fungsional, yaitu indikator arus kas, indikator harga jual dan indikator biaya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Pembukuaan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Sedangkan transaksi dalam mata uang asing di jabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tunai (spot rate) pada saat terjadinya transaksi. Tanggal transaksi adalah tanggal dimana transaksi pertama kali memenuhi syarat pengakuan sesuai dengan SAK ETAP.

a. Periode Pembukuan

Periode pembukuan (Accounting period) adalah tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mecakup Kas, simpanan yang sewaktu - waku bisa di cairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang. Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaanya, disajikan sebagai "Asset yang dibatasi penggunaanya" yang kategorikan sebagai dimiliki hingga jangka tempo yaitu pada saat selesai pembatasan penggunaannya.

c. Piutang Usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penurunan nilai yang di bentuk sebesar estimasi penyisihan piutang tak tertagih. Penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan antara lain pegalaman, prospek usaha dan industri, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas, kemampuan membayar debitur dan agunan yang dikuasai. Piutang usaha disajikan menurut piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan piutang pihak ketiga.

d. Persediaan

Persediaan yang dimiliki Perumda Air Minum terdiri dari Persediaan Bahan Instalasi dan Persediaan Bahan Kimia yang perhitungannya dilaksanakan secara pencatatan berlanjut (perpetual method) dan dicatat menurut harga perolehan dengan penilaian masuk pertama keluar pertama (FIFO).

Metode pencatatan terhadap persediaan bahan operasi menggunakan metode Physical Inventory Method, sedangkan persediaan bahan instalasi dan persediaan suku cadang menggunakan metode Perpetual Method.

Biaya persediaan bahan operasi (kimia, bahan instalasi, bahan operasional lain maupun ATK) menggunakan rumus biaya dengan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau First In First Out (FIFO).

Alokasi persediaan ke aset tetap yang diakui sebagai beban selama umur manfaat aset tersebut dan menambahkan nilai aset hanya jika memenuhi kondisi sebagai berikut :

a. Memperpanjang umur ekonomis
b. Meningkatkan kapasitas, mutu, atau
c. Meningkatkan standar kinerja

Pada setiap tanggal pelaporan terhadap persediaan dilakukan penilaian kemungkinan terjadi penurunan nilai persediaan, misalnya karena rusak atau usang. Persediaan yang menurun nilainya diukur pada harga jual dikurangi biaya untuk menjual, serta mengakui kerugian penurunan nilai dalam pos "kerugian penurunan nilai persediaan".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya - biaya yang dapat diatribusikan lansung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi relokasi. Pajak - pajak yang dapat kreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi aset tetap tidak diperkenankan kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan di mulai pada saat asset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap di hapuskan. Penyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan perhitungan hasil usaha, kecuali memenuhi syarat untuk di kapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan SAK ETAP.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan mengunakan metode garis lurus (straight line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun
Inventaris Kantor	4
Kendaraan	5
Saluran Induk	20
Saluran Sekunder	20
Saluran Rumah	5
Peralatan Pengolahan	15
Bangunan Pengolahan	20
Peralatan Produksi Lainnya	20

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi.

f Pengakuan Pendapatan

Seluruh pendapatan baik pendapatan usaha maupun pendapatan non usaha diukur berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume. Pendapatan penjualan air diakui pada saat water meter pelanggan dibaca, untuk menilai volume pemakaian air oleh pelanggan, selanjutnya volume air dikalikan dengan tarif yang berlaku menjadi pendapatan Perumda Air Minum.

1) Kemungkinan Perumda Air Minum akan memperoleh manfaat ekonomis masa yang akan datang dari aset tersebut.
2) Biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Aset dapat diidentifikasikan sebagai Aset Tidak Berwujud jika :

Dapat dipisahkan, yaitu kemampuannya untuk menjadi terpisah/terbagi dari perusahaan dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan melalui suatu kontrak terkait aset atau kewajiban secara individual atau secara bersama; atau

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f Pengakuan Pendapatan *(lanjutan)*

Muncul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dapat dipisahkan dari perusahaan atau dari hak dan kewajiban lainnya.

Aset Tidak Berwujud diukur sebesar biaya perolehannya, yang meliputi harga beli, bea impor dan pajak yang tidak dapat dikreditkan, serta biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam rangka mempersiapkan aset sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuan manajemen.

g Pengakuan Beban

Beban diakui, dicatat dan dilaporkan dalam periode terjadinya transaksi dan bukan pada saat terjadinya pembayaran. Untuk keperluan pisah batas periode akuntansi, biaya-biaya yang terjadi sebelum tanggal neraca walaupun belum dapat diketahui secara pasti jumlahnya, dicatat dan dilaporkan dengan cara estimasi yang wajar.

h Beban Ditangguhkan

Biaya praoperasional dan biaya-biaya lain yang sejenis dan memberikan manfaat lebih dari satu tahun dikapitalisasi sebagai beban yang ditangguhkan dan diamortisasi selama lima tahun.

Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat diestimasi umur manfaatnya, maka umur manfaatnya dianggap 10 tahun.

i Bunga Pinjaman Jangka Panjang

Beban bunga atas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk membiayai proyek konstruksi dibukukan sebagai penambahan biaya konstruksi selama masa pembangunan sampai proyek tersebut dinyatakan selesai dan beroperasi. Setelah masa konstruksi selesai, bunga pinjaman dibebankan sebagai biaya tahun berjalan dalam kelompok biaya umum.

3. KAS DAN SETARA KAS

	2024	2023
Terdiri dari :		
- Kas Besar	80.219.692	96.952.850
- Kas kecil	3.750.000	3.750.000
- BRI TPI	5.161.470.820	5.809.717.084
- BNI Tpi	804.585.230	232.902.995
- Bank Riau kepri Syariah	726.454.496	541.218.596
- Bank Mandiri TPI	704.537.103	187.556.236
- BPR Duta Kepri 01.8.0000031.6	498.609.068	163.234.083
- BPR Duta Kepri 01.8.000003.0	83.154.483	69.258.857
- Bank Riau kepri	71.899.689	69.110.952
- Bank Mandiri Tg.Uban	15.591.130	17.697.450
- BRI KC Kijang	1.892.016	2.330.016
- BNI Kc. Tg. Uban	294.652	1.343.792
- Bank Muamalat	-	85.702.686
Jumlah	**8.152.458.379**	**7.280.775.597**
Deposito		
- Deposito BRI	300.000.000	300.000.000
- Deposito BPR Duta Kepri	300.000.000	300.000.000
- Deposito Bank Mandiri	170.000.000	170.000.000
- Deposito Bank Riau	100.000.000	100.000.000
- Deposito Bank Muamalat	-	200.000.000
Jumlah	**870.000.000**	**1.070.000.000**
Jumlah	**9.022.458.379**	**8.350.775.597**

4. PIUTANG USAHA - BERSIH

	2024	2023
Terdiri dari :		
- Piutang Air	9.143.886.547	8.726.075.166
- Penyisihan Piutang	(2.260.903.913)	(2.141.353.341)
Jumlah	**6.882.982.634**	**6.584.721.825**

4. PIUTANG USAHA - BERSIH (lanjutan)	2024	2023
Rincian Piutang Air adalah sebagai berikut :		
Piutang Usaha Berdasarkan Kelompok Pelanggan :		
- Piutang Pelanggan Rek.RT	5.314.336.066	5.314.594.216
- Piutang Pelanggan NK	2.141.336.400	2.093.670.700
- Piutang Pelanggan Rek.IP	943.211.081	680.045.600
- Piutang Pelanggan NB	385.322.850	293.618.050
- Piutang Rek.Pelanggan Golongan Khusus	183.100.600	182.462.500
- Piutang Pelanggan Sosial-Khusus	141.087.450	136.201.100
- Piutang Pelanggan Industri	21.722.950	10.933.600
- Piutang Pelanggan Sosial-Umum	13.769.150	14.549.400
Jumlah	**9.143.886.547**	**8.726.075.166**
Rincian Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut : *(Perhitungan Penyisihan Piutang Lihat Lampiran 1)*		
Piutang Usaha Berdasarkan Kelompok Pelanggan :		
- Piutang Pelanggan Rek.RT	1.296.698.000	1.296.760.989
- Piutang Pelanggan NK	409.209.385	400.100.470
- Piutang Pelanggan Rek.IP	350.497.238	252.704.945
- Piutang Rek.Pelanggan Gol Khusus	128.874.340	128.423.190
- Piutang Pelanggan NB	44.312.128	33.766.076
- Piutang Pelanggan Sosial-Khusus	25.359.685	24.479.878
- Piutang Pelanggan Sosial-Umum	3.833.943	4.051.038
- Piutang Pelanggan Industri	2.119.194	1.066.755
Jumlah	**2.260.903.913**	**2.141.353.341**

5. PIUTANG LAIN LAIN	2024	2023
Terdiri dari :		
- Piutang Karyawan	192.420.000	112.000.000
- Piutang Pendapatan Bunga Deposito	14.217.100	14.217.100
- Piutang atas SL Dinas	7.467.762	7.467.762
- Piutang Jaminan Langganan	190.000	190.000
Jumlah	**214.294.862**	**133.874.862**

6. PERSEDIAAN

	2024	2023
Terdiri dari :		
- Persediaan Bahan Kimia	533.734.750	321.023.400
- Persediaan Accessories	303.109.654	270.063.710
- Persediaan Water Meter	202.615.440	124.410.000
- Persediaan Pipa pipa	111.101.000	93.067.100
- Persediaan Bahan Instalasi lainnya	29.700.215	24.514.415
Jumlah	**1.180.261.059**	**833.078.625**

7. ASET TETAP

	31 Desember 2024			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan:				
Tanah	32.674.761.937	-	-	32.674.761.937
Instalasi Pompa	6.925.275.555	403.745.882	-	7.329.021.437
Instalasi Pengolahan	34.538.807.030	17.205.000	-	34.556.012.030
Instalasi Transmisi dan Distribusi	49.078.287.355	423.338.022	-	49.501.625.377
Bangunan	4.130.627.593	-	-	4.130.627.593
Peralatan & Perlengkapan	1.223.617.829	40.800.000	-	1.264.417.829
Kendaraan / Alat	1.981.456.765	-	-	1.981.456.765
Inventaris / Perabot	3.132.987.990	259.380.000	-	3.392.367.990
	133.685.822.054	**1.144.468.904**	-	**134.830.290.958**
Akum. Penyusutan:				
Instalasi Pompa	5.681.059.476	276.159.760	-	5.957.219.236
Instalasi Pengolahan	13.136.012.170	1.505.757.194	-	14.641.769.364
Instalasi Transmisi dan Distribusi	28.222.293.753	3.996.031.102	-	32.218.324.855
Bangunan	1.667.105.980	95.094.276	-	1.762.200.256
Peralatan & Perlengkapan	1.196.124.855	42.691.946	-	1.238.816.801
Kendaraan / Alat	1.864.228.492	61.541.182	-	1.925.769.674
Inventaris / Perabot	3.128.273.714	166.569.114	-	3.294.842.828
	54.895.098.440	**6.143.844.574**	-	**61.038.943.014**
Nilai Buku	**78.790.723.614**			**73.791.347.945**

7. ASET TETAP (lanjutan)

	31 Desember 2023			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan:				
Tanah	32.674.761.937	-	-	32.674.761.937
Instalasi Pompa	6.659.621.924	669.399.513	-	6.925.275.555
Instalasi Pengolahan	34.204.899.910	351.112.120	-	34.538.807.030
Instalasi Transmisi dan Distribusi	48.077.810.466	1.423.814.911	-	49.078.287.355
Bangunan	4.011.373.593	119.254.000	-	4.130.627.593
Peralatan & Perlengkapan	1.205.917.829	58.500.000	-	1.223.617.829
Kendaraan / Alat	1.981.456.765	-	-	1.981.456.765
Inventaris / Perabot	3.051.727.990	340.640.000	-	3.132.987.990
	131.867.570.414	**2.962.720.544**	-	**133.685.822.054**
Akum. Penyusutan:				
Instalasi pompa	5.436.973.596	520.245.640	-	5.681.059.476
Instalasi pengolahan	11.620.655.863	3.021.113.501	-	13.136.012.170
Instalasi transmisi & distribusi	24.208.854.358	8.009.470.497	-	28.222.293.753
Bangunan/gedung	1.566.987.031	195.213.225	-	1.667.105.980
Peralatan & perlengkapan	1.142.975.168	95.841.633	-	1.196.124.855
Kendaraan/alat angkut	1.779.665.206	146.104.468	-	1.864.228.492
Inventaris / Perabot	2.927.268.139	367.574.689		3.128.273.714
	48.683.379.361	**12.355.563.653**	-	**54.895.098.440**
Nilai Buku	**83.184.191.053**			**78.790.723.614**

**Rincian lihat di lampiran 2*

8. ASET TIDAK BERWUJUD / BEBAN DITANGGUHKAN

Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, akun ini merupakan aset tak berwujud masing masing sebesar Rp . 296.710.450 dan Rp. 179.536.950

9. UTANG USAHA

	2024	2023
Terdiri dari :		
- PT. Mahkota Jaya Raya	406.023.000	409.255.000
- Inkop Pamsi	155.400.000	11.828.000
- CV. Ecomoda Bestari TPI	73.942.000	73.942.000
- Toko Maspion Tanjungpinang	38.692.500	38.398.900
- PT. Bima Sakti Alterra Bali	26.030.610	19.321.493
- Toko Bintan Agency Tpi	-	9.351.500
- PT. Tirta Pilar Sejahtera Jakarta	-	256.500.000

9. UTANG USAHA (lanjutan)

	2024	2023
- PT. CRI Fluid Systems Bekasi	-	116.882.448
- PT. Apases Batam	-	2.000.000
- Toko Citra Service Tanjungpinang	-	20.175.000
- Toko Jonson Ban Tanjungpinang	-	1.340.000
- Toko Pelita Tanjunpinang	-	5.175.000
- Toko Putra Jaya Tanjungpinang	-	33.462.400
- Toko Seri Lancar Tanjungpinang	-	16.300.000
- Toko Tunas Harapan Tanjungpinang	-	11.000.000
- Toko Baju Dlavonex Tanjungpinang	-	465.000
- Toko Baju Citra Abadi Jaya Tanjungpinang	-	670.000
- Toko Emas Cantik New Tanjungpinang	-	11.450.000
- Toko Pojok 8 Tokopedia (Online)	-	300.000
Jumlah	**700.088.110**	**1.037.816.741**

10. BEBAN YANG MASIH HARUS DI BAYAR

Terdiri dari :

	2024	2023
- Tunjangan Yang Masih Harus dibayar	142.921.000	97.493.000
- Lembur Yang Masih Harus dibayar	111.088.103	170.722.768
- Biaya Yang Masih Harus dibayar lainnya	17.940.890	28.106.380
Jumlah	**271.949.993**	**296.322.148**

11. KEWAJIBAN IMBALAN PASKA KERJA

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri adalah anggota PERPAMSI (Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia), oleh karena itu dalam hal asuransi dana pensiun mengikuti program dana pensiun PERPAMSI yang di kelola oleh Yayasan Dana Pensiun PERPAMSI (DAPENMA PAMSI), Sesuai dengan surat DAPENMA PAMSI No: 4387/DP.06/XII/2024, tetang kewajiban asuransi perusahaan kepada karyawannya, dinyatakan kewajiban aktuaria imbalan pasca kerja per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.521.926.069,- dan 2023 Rp. 884.231.921,-

12. MODAL DASAR

	2024	2023
Terdiri dari :		
Modal Dasar	632.442.832	632.442.832
Modal Yang Ditarik kembali oleh Pemda Tkt. I Riau Kendaraan Roda 4 & 2	(4.706.099)	(4.706.099)
Jumlah	**627.736.733**	**627.736.733**

Penarikan kembali beberapa kendaraan roda empat dan roda dua oleh Pemda Tingkat I Riau sebesar Rp 4.706.098,00 terjadi dalam tahun 1983 sehingga mengurangi modal dasar sebagaimana tercantum dalam Perda No 2 tahun 1998.

13. KEKAYAAN PEMDA YANG DIPISAHKAN

Jumlah tersebut merupakan nilai penyertaan modal pemerintah yang belum ditetapkan statusnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 atas penyerahan pengelolaan aset proyek dari Kementerian PU Dirjen Cipta Karya, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- Kekayaan Pemda yang dipisahkan-Pemprov	4.417.176.400	4.417.176.400
- Kekayaan pemda yang dipisahkan-Pemkab	1.682.138.710	1.682.138.710
- Tambahan penyertaan modal Pemprov	6.820.649.969	6.820.649.969
- Tambahan penyertaan modal Pemprov (Atas Penghapusan Hutang RDA)	22.334.448.921	22.334.448.921
- Tambahan penyertaan modal pemprov kepri (Atas Penambahan Aset Tetap)	68.945.676.816	68.945.676.816
Jumlah Uang Titipan	**104.200.090.816**	**104.200.090.816**

Penyertaan Eks Pemerintah Pusat	2024	2023
- Modal Pemda Dati II Kab Kepulauan Riau	1.682.138.710	1.682.138.710
- Penyertaan Modal Pemprov Kepri	4.417.176.400	4.417.176.400
- Tambahan Penyertaan Modal (Bahan Instalasi)	553.166.860	553.166.860
- Tambahan dari cabang Tanjung Uban	2.184.249.312	2.184.249.312
- Tambahan dari cabang Kijang	4.083.233.797	4.083.233.797
- Tambahan penyertaan modal Pemprov	68.945.676.816	68.945.676.816
- Tambahan penyertaan modal Pemprov	22.334.448.921	22.334.448.921
Jumlah penyertaan eks Pemerintah Pusat	**104.200.090.816**	**104.200.090.816**

Penambahan penyertaan Modal Non Kas dari Pemerintah Pusat melalui Pemprov Kepri kepada Perumda Air Minum Tirta Kepri tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 22.334.448.921,- berdasarkan penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 13130/SP2D/1.20.06.02/2016 dan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 0510/SPM/LS-LN/PPKD/XII/2016.

14. PENYERTAAN PEMDA YANG BELUM DITETAPKAN

Jumlah tersebut merupakan penyertaan Pemda yang belum ditetapkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- Subsidi Pemda TK I Riau dengan Pemerintah Pusat	564.033.700	564.033.700
- Subsidi Silang antar PDAM	131.580.000	131.580.000
Jumlah	**695.613.700**	**695.613.700**

Subsidi Pemda Tk I Riau merupakan subsidi Pemda Tk I Riau dan pemerintah pusat (APBN) yang masih belum ditetapkan statusnya berupa bahan kimia dan instalasi lainnya sampai dengan 31 Des 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
- Bahan Kimia		
- Dipda tahun anggaran 1980/1981	46.500.000	46.500.000
- Dipda tahun anggaran 1980/1981	70.000.000	70.000.000
- Instalasi Listrik		
- Dipda tahun anggaran 1982/1983	60.000.000	60.000.000
- Instalasi Perpompan		
- Dipda tahun anggaran 1983/1984	56.000.000	56.000.000
- Pengadaan dan Pemasangan Pipa Trans dan Distribusi		
- Dipda tahun anggaran 1984/1985	71.588.700	71.588.700
- Instalasi Perluasan Jaringan Pipa		
- Dipda tahun anggaran 1984/1985	71.955.000	71.955.000
- Pengadaan dan pemasangan Jaringan Pipa Distribusi		
- Dipda tahun anggaran 1986/1987	71.079.000	71.079.000
- Pembuatan tanggul pada instalasi penjernihan S. Pulai		
- Dipda tahun anggaran 1989/1990	116.320.000	116.320.000
- Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi		
- Dipda tahun anggaran 1990/1991	591.000	591.000
Jumlah	**564.033.700**	**564.033.700**

15. HIBAH

	2024	2023
Terdiri dari :		
- Modal Hibah Pemda Tk II Kepri	250.000.000	250.000.000
- Modal Hibah Bantuan PPAB Pemda Tk II Kepri	49.326.000	49.326.000
- Modal Hibah Pemprov Kepri	2.500.000.000	2.500.000.000
- Modal Tanah	9.374.808.175	9.374.808.175

15. HIBAH (lanjutan)

	2024	2023
- Modal Hibah Pihak ke - 3		
PT. Sinar Bodhy Cipta	727.138.739	727.138.739
PT. Data Jaya Sakti	105.894.013	105.894.013
PT. Duta Perumahan Inti Sakti	6.737.500	6.737.500
- Modal Hibah Perum Perumnas	2.766.525.387	2.766.525.387
Jumlah	**15.780.429.814**	**15.780.429.814**

16. LABA (RUGI) DITAHAN DAN PERIODE BERJALAN

	2024	2023
Terdiri dari :		
- Laba Ditahan	(28.649.530.400)	(26.772.305.949)
- Penyesuian Laba Ditahan	(637.694.147)	371.834.746
- Saldo Laba (Rugi) Berjalan	(3.122.555.359)	(2.249.059.197)
Jumlah	**(32.409.779.906)**	**(28.649.530.400)**
- Akumulasi kerugian sampai dengan tahun 2013	(16.403.957.141)	(16.403.957.141)
- Koreksi bunga pinjaman RDA tahun 2012 dan 2013	(3.632.987.058)	(3.632.987.058)
- Akumulasi Laba (Rugi) tahun 2014	(2.937.775.571)	(2.937.775.571)
- Laba tahun 2014	934.127.594	934.127.594
- Rugi tahun 2015 dan 2020	(3.815.946.150)	(3.815.946.150)
- Laba Tahun 2020	2.276.059.834	2.276.059.834
- Rugi tahun 2021	(8.044.425)	(8.044.425)
- Koreksi laba ditahan	899.982.041	1.537.676.188
- Rugi tahun 2022	(4.349.624.474)	(4.349.624.474)
- Rugi tahun 2023	(2.249.059.197)	(2.249.059.197)
- Rugi tahun 2024	(3.122.555.359)	-
Jumlah	**(32.409.779.906)**	**(28.649.530.400)**

17. PENDAPATAN PENJUALAN AIR

	2024	2023
Terdiri dari :		
- Harga Air	29.067.709.450	26.575.154.950
- Dana Meter	2.812.750.000	2.778.090.000
- Administrasi	418.851.000	413.992.500
Jumlah	**32.299.310.450**	**29.767.237.450**

18. PENDAPATAN NON AIR

	2024	2023
Terdiri dari :		
- Pendapatan Sambungan Baru	531.930.174	1.059.954.149
- Pendapatan Denda	838.886.000	847.633.000
- Pendapatan Penyambungan Kembali	139.000.000	151.600.000
- Pendapatan Penggantian Meter Rusak	23.430.000	24.090.000
- Pendapatan Pemeriksaan Instalasi Pelanggan	60.000	350.000
- Jaminan langganan	53.850.000	102.050.000
- Pendapatan denda pelanggaran	36.147.500	23.402.500
- Pendapatan Non Air Lainnya	388.572.629	319.852.686
Jumlah Pendapatan Non Air	**2.011.876.303**	**2.528.932.335**
Jumlah Pendapatan	**34.311.186.753**	**32.296.169.785**

19. BEBAN OPERASIONAL

	2024	2023
Terdiri dari :		
- Beban Pegawai	14.555.095.350	13.355.419.564
- Beban Listrik	7.817.811.864	7.204.313.283
- Beban Pemakaian Bahan Kimia	1.565.498.150	1.893.460.800
- Beban Pemeliharaan	2.846.920.448	2.737.137.809
- Beban Operasional Lainnya	4.602.336.398	3.213.578.738
- Beban Penyusutan	6.143.844.574	6.211.719.079
Jumlah	**37.457.564.784**	**34.615.629.273**
Rincian dari beban operasional :		
Beban Pegawai		
- Beban Pegawai - Operasi Pengolahan Air	3.303.134.026	3.272.861.647
- Beban Pegawai - Operasi Transmisi dan Distribusi	1.567.367.598	1.910.516.171
- Beban Pegawai - Umum dan Administrasi	9.684.593.726	8.172.041.746
Jumlah	**14.555.095.350**	**13.355.419.564**
Beban Listrik		
- Beban Listrik Produksi	7.616.418.812	7.142.993.009
- Beban Listrik - Operasi Transmisi dan Distribusi	201.393.052	61.320.274
Jumlah	**7.817.811.864**	**7.204.313.283**
Beban Pemakaian Bahan Kimia		
- Beban Pemakaian Bahan Kimia	1.565.498.150	1.893.460.800

19. BEBAN OPERASIONAL (lanjutan)

	2024	2023
Beban Pemeliharaan		
- Beban Pemeliharaan Pengolahan Air	644.939.479	750.016.531
- Beban Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi	1.869.877.560	1.687.988.278
- Beban Pemeliharaan Umum dan Administrasi	332.103.409	299.133.000
Jumlah	**2.846.920.448**	**2.737.137.809**
Beban Operasional Lainnya		
- Beban Kantor	381.938.705	447.859.429
- Beban penyisihan Piutang	119.550.572	154.034.748
- Beban Operasional lainnya	4.100.847.121	2.611.684.561
Jumlah	**4.602.336.398**	**3.213.578.738**
Beban Penyusutan		
- Beban Penyusutan Pengolahan Air	1.781.916.954	1.759.442.188
- Beban Penyusutan Transmisi dan Distribusi	3.996.031.102	4.013.439.394
- Beban Penyusutan Instalasi umum	365.896.518	438.837.497
Jumlah	**6.143.844.574**	**6.211.719.079**

20. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

Jumlah tersebut merupakan beban non operasional PDAM kurun waktu 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
Pendapatan Non Operasional		
- Pendapatan Jasa Giro	115.565.425	83.110.351
- Pendapatan Bunga Deposito	26.882.472	25.459.577
Jumlah	**142.447.897**	**108.569.928**
Beban Non Operasional		
- Beban Lain lain	(44.683.225)	(38.169.637)
Jumlah	**(44.683.225)**	**(38.169.637)**

PERUMDA AIR MINUM TIRTA KEPRI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG TAHUN 2024

	Saldo Piutang	Estimasi Penyisihan Piutang				Jumlah
Golongan Pelanggan	**31/12/2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Penyisihan 2024**
SOSIAL UMUM	13.769.150	27,85%	27,84%	27,84%	27,84%	3.833.943
SOSIAL KHUSUS	141.087.450	17,99%	17,96%	17,97%	17,97%	25.359.685
RUMAH TANGGA	5.314.336.066	24,41%	24,39%	24,40%	24,40%	1.296.698.000
INSTANSI PEMERINTAH	943.211.081	37,15%	37,17%	37,16%	37,16%	350.497.238
NIAGA KECIL	2.141.336.400	19,12%	19,10%	19,11%	19,11%	409.209.385
NIAGA BESAR	385.322.850	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%	44.312.128
INDUSTRI	21.722.950	9,75%	9,76%	9,76%	9,76%	2.119.194
GOLONGAN KHUSUS	183.100.600	70,39%	70,38%	70,38%	70,38%	128.874.340
Jumlah	**9.143.886.547**					**2.260.903.913**
Akumulasi Penyisihan piutang tahun 2023						**2.141.353.341**
Selisih ini merupakan beban penyisihan piutang						**119.550.572**

PERUMDA AIR MINUM TIRTA KEPRI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAFTAR AKTIVA TETAP DAN PENYUSUTANNYA
PER 31 DESEMBER 2024

JENIS AKTIVA TETAP	NILAI PEROLEHAN PER Per 31-12-2023	MUTASI 2024		NILAI PEROLEHAN PER Per 31-12-2024	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31-12-2023	MUTASI PENYUSUTAN 2024		AKUMULASI PENYUSUTAN S/D 31-12-2024	NILAI BUKU PER 31/12/2024
		PENAMBAHAN	PENGURANGAN			PENGURANGAN	PENAMBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tanah dan Penyempurnaan Tanah	32.674.761.937,00		-	32.674.761.937,00	-	-	-	-	32.674.761.937,00
Instalasi Pompa :									
Bangunan Dan Perbaikannya Instalasi Pompa	104.586.450,00	125.000.000,00		229.586.450,00	70.436.950,00		189.905.642,00	260.322.592,00	(30.736.142,00)
Pembangkit Tenaga Listri	88.175.375,00	32.700.000,00		120.875.375,00	88.475.275,00	-	38.000.000,00	126.475.275,00	(5.600.100,00)
Peralatan Pompa	5.118.620.963,00	89.000.125,00		5.207.621.088,00	4.217.771.252,00	-	12.000.000,00	4.229.771.252,00	977.849.836,00
Instalasi Pompa Lainnya	1.613.892.967,00	157.045.757,00		1.770.938.724,00	1.304.395.999,00	-	36.254.118,00	1.340.650.117,00	430.288.607,00
Jumlah	6.925.275.555,00	403.745.882,00	-	7.329.021.437,00	5.681.059.476,00	-	276.159.760,00	5.957.219.236,00	1.371.802.201,00
Instalasi Pengolahan Air :									
Bangunan Dan Perbaikannya Pengolahan Air	10.085.570.030,00	5.580.000,00		10.091.150.030,00	1.291.384.255,00	-	445.077.886,00	1.736.462.141,00	8.354.687.889,00
Alat-Alat Pengolahan Air	55.034.027,00			55.034.027,00	32.442.943,00	-	132.827.756,00	165.270.699,00	(110.236.672,00)
Reservoir/Penampungan Air	1.621.420.511,00	4.985.000,00	-	1.626.405.511,00	907.716.823,00	-	341.597.434,00	1.249.314.257,00	377.091.254,00
Pompa Pengolahan	189.945.000,00			189.945.000,00	151.385.291,00		586.254.118,00	737.639.409,00	(547.694.409,00)
Perpipaan dalam instalasi	10.813.751.004,00	3.750.000,00		10.817.501.004,00	1.717.735.310,00			1.727.735.310,00	9.089.765.694,00
Instalasi Pengolahan Air Lainnya	11.775.976.510,00	2.890.000,00		11.775.976.510,00	9.025.247.544,00			9.025.247.544,00	2.750.628.966,00
Jumlah	34.538.807.082,00	17.205.000,00	-	34.556.012.082,00	13.136.012.166,00	-	1.505.737.194,00	14.641.769.360,00	19.914.242.722,00
Instalasi Transmisi & Distribusi :									
Bangunan Dan Perbaikannya Transmisi dan Distribusi	177.471.933	48.853.990,00		226.325.832,65	152.085.209,00	-	305.890.000,00	457.975.209,00	(231.649.376,35)
Pipa Transmisi	6.152.693.619	17.890.000,00		6.170.583.619,10	2.958.639.106,00	-	375.990.000,00	3.334.629.106,00	2.835.954.513,10
Pipa Distribusi	25.014.147.701	63.279.000,00		25.077.426.700,54	10.891.482.311,00	-	662.693.080,00	11.554.175.391,00	13.523.251.309,54
Pipa Dinas	14.561.555.276	14.900.000,00		14.576.455.276,35	9.287.331.628,00	-	1.012.000.000,00	10.299.331.628,00	4.277.123.648,35
Meter Air Yang Terpasang	2.019.728.673	34.215.122,00		2.053.943.795,31	2.205.449.015,00	-	1.005.205.000,00	3.210.654.015,00	(1.156.710.219,67)
Leding Umum	51.241.430	25.200.000,00		76.441.430,40	30.553.973,00		634.253.022,00	664.806.995,00	(588.365.564,60)
Saluran Air Pemakai Kebakaran	94.812.861	45.000.000,00		139.812.860,58	83.727.247,00			83.727.247,00	56.085.613,58
Sambungan Pipa	15.704.979	70.000.000,00		94.704.978,84	10.625.789,00			10.625.789,00	84.079.189,84
Instalasi Transmisi & Distribusi Lain	990.930.831	95.000.000,00		1.085.930.831,21	2.602.399.479,00	-		2.602.399.479,00	(1.516.468.647,79)
Jumlah	49.078.287.303,00	423.338.022,00	-	49.501.625.325,09	28.222.293.757,00	-	3.996.031.102,00	32.218.324.859,00	17.283.300.466,00
Bangunan & Gedung:									
Bangunan Kantor	508.447.872,00			508.447.872,00	281.891.085,00	-	20.000.000,00	301.891.085,00	206.556.787,00
Bangunan Gedung Peralatan	1.411.561.898,00			1.411.561.898,00	201.950.000,00	-	30.000.000,00	231.950.000,00	1.179.611.898,00
Bangunan Bengkel	1.476.775,00			1.476.775,00	224.625.789,00	-	32.693.280,00	257.319.069,00	(255.842.294,00)
Bangunan Rumah Dinas	2.209.141.048,00			2.209.141.048,00	958.639.106,00	-	12.401.296,00	971.040.302,00	1.238.100.746,00
Jumlah	4.130.627.593,00	-	-	4.130.627.593,00	1.667.105.980,00	-	95.094.276,00	1.762.200.256,00	2.368.427.337,00
Jumlah dipindahkan	127.347.759.470,00	844.288.904,00	-	128.192.048.374,00	48.790.471.379,00	-	5.873.042.332,00	54.579.513.711,00	73.612.534.663,00
Peralatan dan perlengkapan									
Alat-Alat Pergudangan	21.502.984,00	12.260.911,00		33.763.895,00	458.639.106,00	-	20.000.000,00	478.639.106,00	(444.875.211,00)
Alat-Alat Laboratorium	179.980.852,00	13.339.089,00		193.319.941,00	97.465.987,00		5.001.134,00	102.467.121,00	90.852.820,00
Alat-Alat Perhubungan/Telekomunikasi	77.999.936,00			77.999.936,00	173.991.437,00		14.422.812,00	188.414.249,00	(110.414.313,00)
Alat-Alat Kerja/Bengkel	101.866.349,00	15.200.000,00		117.066.349,00	203.950.000,00		3.268.000,00	207.218.000,00	(90.151.651,00)
Rupa-Rupa Alat Dan Perlengkapan Lain	862.267.708,00			862.267.708,00	262.078.325,00			262.078.325,00	580.189.383,00
Jumlah	1.223.617.829,00	40.800.000,00	-	1.264.417.829,00	1.196.124.855,00	-	42.691.946,00	1.238.816.801,00	25.601.028,00
Kendaraan & Alat Pengangkut									
Kendaraan Roda 4 (empat)	637.527.765,00			637.527.765,00	158.639.106,00	-	20.000.000,00	178.639.106,00	458.888.659,00
Kendaraan Roda 2 (dua)	557.873.000,00			557.873.000,00	186.569.624,00	-	14.001.134,00	200.570.758,00	357.302.242,00
Kendaraan Penumpang	195.215.000,00			195.215.000,00	483.991.437,00	-	14.422.812,00	498.414.249,00	(303.199.249,00)
Kendaraan Angkut Material	230.043.000,00			230.043.000,00	477.950.000,00	-	3.268.000,00	481.218.000,00	(251.175.000,00)
Kendaraan tidak bermotor	360.798.000,00			360.798.000,00	557.078.325,00		9.849.256,00	241.564.400,00	119.233.600,00
Jumlah	1.981.456.765,00	-	-	1.981.456.765,00	1.864.228.492,00	-	61.541.182,00	1.358.842.113,00	381.050.252,00
Inventaris/Perabot kantor:									
Meubelair Kantor	488.636.500,00	110.385.000,00		599.021.500,00	890.000.000,00	-	44.967.236,00	934.967.236,00	(335.945.736,00)
Mesin-Mesin Kantor	1.249.512.790,00	79.012.850,00	-	1.328.525.550,00	1.238.273.714,00	-	84.001.134,00	1.322.274.848,00	6.250.702,00
Rupa-Rupa Inventaris/Perabot Kantor Lain	1.394.838.790,00	69.982.150,00		1.464.820.940,00	1.000.000.000,00	-	37.600.744,00	1.037.600.744,00	427.220.196,00
			-	-		-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	3.132.987.990,00	259.380.000,00	-	3.392.367.990,00	3.128.273.714,00	-	166.569.114,00	3.294.842.828,00	97.525.162,00

PERUMDA AIR MINUM TIRTA KEPRI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAFTAR AKTIVA TETAP DAN PENYUSUTANNYA
PER 31 DESEMBER 2024

JENIS AKTIVA TETAP	NILAI PEROLEHAN PER. Per 31-12-2023	MUTASI 2024		NILAI PEROLEHAN PER. Per 31-12-2024	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31-12-2023	MUTASI PENYUSUTAN 2024		AKUMULASI PENYUSUTAN S/D 31-12-2024	NILAI BUKU PER. 31/12/2024
		PENAMBAHAN	PENGURANGAN			PENGURANGAN	PENAMBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			-	-		-	-	-	-
			-	-		-	-	-	-
			-	-		-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total	133.685.822.054,00	1.144.668.904,00	-	134.830.290.958,00	54.895.099.440,00	-	6.143.844.574,00	61.038.943.014,00	73.791.347.944,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan	-		-	-		-		-	-
Jumlah Total	133.685.822.054	1.144.668.904	-	134.830.290.958	54.895.099.440	-	6.143.844.574	61.038.943.014	73.791.347.944

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PT.PEMBANGUNAN KEPRI

PT. PEMBANGUNAN KEPRI (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
PERIODE DESEMBER 2025

ASET		**KEWAJIBAN DAN EKUITAS**	
ASET LANCAR		**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	
Kas dan setara kas	125,030,552	Hutang Usaha	3,459,148,678
Piutang usaha	1,746,760,184	Hutang lain-lain	190,500,500
Piutang lain-lain	995,633,564	Hutang Pajak	1,517,602,165
Uang Muka	-	Jumlah Kewajiban Lancar	**5,167,251,343**
Beban dibayar dimuka	485,163,909		
Jumlah Aset Lancar	**3,352,588,210**	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	
		Kewajiban Jangka Panjang	9,432,585,848
ASET TIDAK LANCAR			
Investasi lain-lain	-	**Jumlah Kewajiban**	**14,599,837,191**
Investasi pada perusahaan asosiasi	11,927,469,833		
Aset tetap - bersih	73,965,017	**HAK MINORITAS**	
Aset pajak tangguhan	1,565,524,832	**EKUITAS**	
Aset lain-lain	544,881,100	Modal Saham	14,000,000,000
Jumlah Aset Tidak Lancar	**14,111,840,782**	Retained Earnings	(11,458,488,023)
		Current Year Earnings	323,079,823
		Jumlah Ekuitas	**2,864,591,800**
JUMLAH ASET	**17,464,428,991**	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS**	**17,464,428,991**

Mengetahui,

Azwardi, S.Sos., MH
Direktur

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PT.PEMBANGUNAN KEPRI

PT. PEMBANGUNAN KEPRI (PERSERODA)
LAPORAN LABA/RUGI
PERIODE DESEMBER 2025

PENDAPATAN	1,314,715,020
HARGA POKOK PENDAPATAN	(1,375,239,340)
LABA KOTOR	(60,524,320)
BEBAN USAHA	(839,933,173)
RUGI USAHA	(900,457,493)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	
Pendapatan bunga	3,589,868
Beban bunga	-
Pendapatan lain-lain	-
Bagian laba (rugi) perusahaan asosiasi	1,220,930,233
Laba (rugi) penjualan aset tetap	-
Administrasi bank	(982,785)
Beban lain-lain	-
Laba (rugi) selisih kurs	-
Jumlah Pendapatan dan Biaya lain-lain	**1,223,537,316**
RUGI SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	**323,079,823**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	
Tahun Berjalan	-
Tangguhan	-
LABA BERSIH	**323,079,823**
PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAINNYA	-
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	**323,079,823**

Mengetahui,



Azwardi, S.Sos.,MH
Direktur

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PT.PEMBANGUNAN KEPRI

PT. PEMBANGUNAN KEPRI (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS
PERIODE DESEMER 2025

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
PENDAPATAN USAHA	1,314,715,020	
PENDAPATAN NON USAHA	1,224,520,101	
JUMLAH PENDAPATAN		**2,539,235,121**
HARGA POKOK PENJUALAN	1,375,239,340	
BEBAN TETAP	839,933,173	
BEBAN NON USAHA	982,785	
JUMLAH BEBAN		**2,216,155,298**
LABA RUGI TAHUN BERJALAN		**323,079,823**
PENYESUAIAN UNTUK MEREKONSILIASI LABA TAHUN BERJALAN MENJADI ARUS KAS		
BERSIH DIPEROLEH DARI KEGIATAN OPERASI :		
PENYUSUTAN ASET TETAP	-	
PENYESUAIAN SALDO LABA	-	
PENYESUAIAN ATAS MUTASI SALDO LAPORAN NERACA		**-**
PIUTANG USAHA KEPADA PIHAK KETIGA	-	
PIUTANG LAIN LAIN	(113,374,399)	
PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	
BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR	-	
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	
HUTANG PAJAK	-	
		(113,374,399)
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN OPERASI		**209,705,424**
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI		
PENAMBAHAN ASET TETAP	(128,946,359)	
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	-	
		(128,946,359)
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PENDANAAN		
PENAMBAHAN EKUITAS LAINNYA	-	
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN	-	
		-
KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK		**80,759,065**
KAS DAN BANK AWAL		**44,271,487**
KAS DAN BANK AKHIR		**125,030,552**

Mengetahui,

Azwardi S.Sos.,MH
Direktur

PT. PEMBANGUNAN KEPRI (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PERIODE DESEMBER 2025

	Modal Saham	Laba ditahan	Jumlah
Saldo per 01 Januari 2024	14.000.000.000	(11.503.545.694)	2.496.454.306
Laba/Rugi tahun 2024		45.057.671	45.057.671
Saldo per 31 Desember 2024	14.000.000.000	(11.458.488.023)	2.541.511.977
Laba/Rugi tahun 2025		323.079.823	323.079.823
Saldo per 31 Desember 2025	**14.000.000.000**	**(11.135.408.200)**	**2.864.591.800**

Mengetahui,



Azwardi, S.Sos.,MH
Direktur

PT. PEMBANGUNAN KEPRI (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PERIODE DESEMBER 2025

	Modal Saham	Laba ditahan	Jumlah
Saldo per 01 Januari 2024	14.000.000.000	(11.503.545.694)	2.496.454.306
Laba/Rugi tahun 2024		45.057.671	45.057.671
Saldo per 31 Desember 2024	14.000.000.000	(11.458.488.023)	2.541.511.977
Laba/Rugi tahun 2025		323.079.823	323.079.823
Saldo per 31 Desember 2025	**14.000.000.000**	**(11.135.408.200)**	**2.864.591.800**

Mengetahui,



Azwardi, S.Sos.,MH
Direktur



LAPORAN KEUANGAN

AUDITED

RSUD RAJA AHMAD TABIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tahun Anggaran 2025



rsudtpi.kepriprov.go.id/

0771-733 5203

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RSUD RAJA AHMAD TABIB
Jalan WR. Supratman No. 100 KM. 8 Tanjungpinang Kode Pos. 29124
Telp/ Fax. 0771- 733 5203 Customer care : 081275812812
Pos-el : rsud.rat@kepriprov.go.id Laman : www.rsudprovkepri.go.id

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ahmad Tabib (RAT) Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah benar tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Tanjungpinang, Mei 2026
Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib
Provinsi Kepulauan Riau

dr. Bambang Utoyo, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 198101292009041003

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
RAJA AHMAD TABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

DAFTAR ISI

Halaman

Cover
Pernyataan Tanggung Jawab
Daftar isi
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
3. NERACA
4. LAPORAN OPERASIONAL
5. LAPORAN ARUS KAS
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN
- A. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan 1
- B. Periode Pelaporan Keuangan 3
- C. Penanggung jawab Laporan Keuangan 3
- D. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 3
- E. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan 5

BAB II PROFIL SKPD
- A. Sumber Daya RSUD RAT 7
- B. Strategi dan arah kebijakan 9
- C. Program dan kegiatan 12

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025
- A. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2025 17

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
- A. Entitas Pelaporan 19
- B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan 19
- C. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan 20
- D. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan 20
- E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan 21
- F. Kebijakan Akuntansi Belanja 22
- G. Kebijakan Akuntansi Persediaan 23
- H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap 24

I. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya 25
J. Kebijakan Akuntansi Kewajiban 27
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
1. Laporan Realisasi Anggaran 29
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 38
3. Neraca 39
4. Laporan Operasional 57
5. Laporan Arus Kas 61
6. Laporan Perubahan Ekuitas 65
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
1. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi 68
2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas 68
BAB VIII PENUTUP 69
LAMPIRAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	258,467,126,274.00	263,093,577,020.57	101.79	235,316,966,318.01
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	258,467,126,274.00	263,093,577,020.57	101.79	235,316,966,318.01
	Pendapatan dari APBD	118,465,598,275.00	118,319,361,536.00	99.88	119,248,318,550.32
4.1.02	Retribusi Daerah	139,172,026,866.00	143,676,580,791.00	103.24	115,162,680,173.30
4.1.04	Lain lain PAD yang Sah	829,501,133.00	1,097,625,693.57	132.32	905,967,594.39
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	258,467,126,274.00	263,093,577,020.57	101.79	235,316,966,318.01
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGA	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	258,467,126,274.00	263,093,577,020.57	101.79	235,316,966,318.01
5	BELANJA DAERAH	266,643,813,304.00	262,650,041,010.93	98.50	251,836,588,613.32
5.1	BELANJA OPERASI	257,387,351,565.00	253,868,136,957.93	98.63	233,230,226,401.00
5.1.01	Belanja Pegawai	119,993,527,681.15	127,306,623,672.00	106.09	98,546,369,902.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137,393,823,883.85	126,561,513,285.93	92.12	134,683,856,499.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	257,387,351,565.00	253,868,136,957.93	98.63	233,230,226,401.00
5.2	BELANJA MODAL	9,256,461,739.00	8,781,904,053.00	94.87	18,606,362,212.32
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9,054,441,739.00	8,781,904,053.00	96.99	6,687,428,829.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	202,020,000.00	0.00	0.00	7,799,433,383.32

5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	4,119,500,000.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**9,256,461,739.00**	**8,781,904,053.00**	**94.87**	**18,606,362,212.32**
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	JUMLAH BELANJA	**266,643,813,304.00**	**262,650,041,010.93**	**98.50**	**251,836,588,613.32**
	SURPLUS/DEFISIT	**(8,176,687,030.00)**	**443,536,009.64**	**(5.42)**	**(16,519,622,295.31)**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0.00	222,455,773.93	0.00	16,742,078,069.24
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**0.00**	**222,455,773.93**	**0.00**	**16,742,078,069.24**
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**0.00**	**222,455,773.93**	**0.00**	**16,742,078,069.24**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**(8,176,687,030.00)**	**665,991,783.57**	**(8.15)**	**222,455,773.93**

Tanjungpinang, Mei 2026

DIREKTUR RSUD RAJA AHMAD TABIB

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

[illegible] UTOMO, M.A.P

NIP 198101292009041003

2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal 2025	222,456,773.93	16,742,078,069.24
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun Berjalan	222,456,773.93	16,742,078,069.24
Sub Total	**0.00**	**0.00**
Penggunaan Lebih/Kurang Pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	665,991,783.57	222,456,773.93
Sub Total	**665,991,783.57**	**222,456,773.93**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0.00	0.00
Lain-lain	0.00	0.00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**665,991,783.57**	**222,456,773.93**

Tanjungpinang, Mei 2026
DIREKTUR RSUD RAJA AHMAD TABIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dr. BAMBANG UTOYO, M.A.P
NIP. 19810129200904 1003

3. NERACA

PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib

NERACA

TAHUN ANGGARAN 2025

1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	308,278,723,181.94	333,738,368,415.99
1.1	ASET LANCAR	19,738,233,902.03	21,683,446,667.45
1.1.01	Kas dan Setara Kas	665,991,783.57	222,455,773.93
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	4,186,687,864.00	10,940,874,023.00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5,542,944.00	-
1.1.10	Penyisihan Piutang	(2,459,472,357.05)	(2,423,273,270.46)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	-	55,742,777.78
1.1.12	Persediaan	17,339,483,667.51	12,887,647,363.20
	JUMLAH ASET LANCAR	19,738,233,902.03	21,683,446,667.45
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	-	-
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	-	-
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-
1.3	ASET TETAP	282,769,214,279.85	306,272,971,748.48
1.3.02	Peralatan dan Mesin	376,835,328,830.53	331,051,512,639.53
1.3.03	Gedung dan Bangunan	272,603,365,212.56	270,696,151,212.56
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12,279,215,917.36	12,279,215,917.36
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	640,455,426.00	640,455,426.00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	923,202,500.00	923,202,500.00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(380,512,353,606.60)	(309,317,565,946.97)
	JUMLAH ASET TETAP	282,769,214,279.85	306,272,971,748.48
	JUMLAH DANA CADANGAN	-	-
1.5	ASET LAINNYA	5,771,275,000.06	5,781,950,000.06
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	5,819,275,000.06	5,819,275,000.06
1.5.04	Aset Lain-lain	17,561,084,497.00	17,571,759,497.00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(48,000,000.00)	(48,000,000.00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(17,561,084,497.00)	(17,561,084,497.00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	5,771,275,000.06	5,781,950,000.06
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	-	-
	JUMLAH ASET	308,278,723,181.94	333,738,368,415.99
2	KEWAJIBAN	34,119,078,837.00	30,547,292,053.00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	34,119,078,837.00	30,547,292,053.00
2.1.06	Utang Belanja	34,119,078,837.00	30,547,292,053.00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	34,119,078,837.00	30,547,292,053.00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	34,119,078,837.00	30,547,292,053.00
3	EKUITAS	274,159,644,344.94	303,191,076,362.99
3.1	EKUITAS	274,159,644,344.94	303,191,076,362.99
3.1.01	Ekuitas	274,159,644,344.94	303,191,076,362.99
	JUMLAH EKUITAS	274,159,644,344.94	303,191,076,362.99
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	308,278,723,181.94	333,738,368,415.99

Tanjungpinang, Mei 2026

DIREKTUR RSUD RAJA AHMAD TABIB

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dr. DARMADI UTOYO, M.A.P

NIP. 19701292009041003

4. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN	175,430,697,167.57	123,232,938,975.69	42.36
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	138,025,996,069.57	123,232,938,975.69	12.00
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	136,922,827,432.00	122,326,971,381.30	11.93
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	1,103,168,637.57	905,967,594.39	21.77
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	138,025,996,069.57	123,232,938,975.69	12.00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	37,404,701,098.00	-	-
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	37,404,701,098.00	-	-
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	37,404,701,098.00	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	175,430,697,167.57	123,232,938,975.69	42.36
8	BEBAN	289,180,022,674.62	277,513,367,719.91	4.20
8.1	BEBAN OPERASI	253,328,740,347.62	239,878,988,620.18	5.61
8.1.01	Beban Pegawai	128,224,709,398.00	98,479,478,307.00	30.20
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	125,026,549,777.40	140,954,589,182.53	(11.30)
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	77,481,172.22	444,921,130.65	(82.59)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	253,328,740,347.62	239,878,988,620.18	5.61
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	35,851,282,327.00	37,634,379,099.73	(4.74)
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	35,851,282,327.00	37,634,379,099.73	(4.74)
	JUMLAH BEBAN	289,180,022,674.62	277,513,367,719.91	4.20
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(113,749,325,507.05)	(154,280,428,744.22)	(26.27)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(113,749,325,507.05)	(154,280,428,744.22)	(26.27)
POS LUAR BIASA				
8.5	BEBAN LUAR BIASA	-	-	-
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(113,749,325,507.05)	(154,280,428,744.22)	(26.27)

Tanjungpinang, Mei 2026
DIREKTUR RSUD RAJA AHMAD TABIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dr. BAMBANG UTOYO, M.A.P
NIP. 198101292009041003

56	*Jumlah Arus Kas Keluar (55)*	0.00	0.00
57	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (53-56)**	0.00	0.00
58	Kenaikan/ (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (14+39+51+58)	443,536,809.64	(16,519,622,295.31)
59	Saldo Awal Kas di BLUD	222,456,773.93	16,742,078,069.24
60	Saldo Akhir Kas di BLUD	665,991,783.57	222,456,773.93

Tanjungpinang Mei 2026
DIREKTUR RSUD RAJA AHMAD TABIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dr. [redacted] UDOYO, M.A.P
NIP. 198101292009041003

5. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	*Arus Kas Masuk*		
3	Pendapatan APBD	118,319,361,336.00	119,348,318,550.32
4	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	143,876,589,791.00	115,162,880,173.30
5	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	0.00	0.00
6	Pendapatan Kerja sama BLUD	881,646,442.00	0.00
7	Pendapatan Hibah	0.00	0.00
8	Pendapatan Lain-lain BLUD	235,980,251.57	905,967,584.39
9	*Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d 8)*	**263,093,577,029.57**	**235,319,166,310.01**
10	*Arus Kas Keluar*		
11	Belanja Pegawai	127,308,623,872.00	98,546,369,902.00
12	Belanja Barang dan Jasa	126,561,513,285.93	134,683,856,499.00
13	*Jumlah Arus Kas Keluar (11 s/d 12)*	**253,868,136,957.93**	**233,230,226,401.00**
14	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (9-13)**	**9,225,440,062.64**	**2,088,739,917.01**
15			
16	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan**		
17	*Arus Kas Masuk*		
18	Penjualan Atas Tanah		
19	Penjualan Peralatan dan Mesin	0.00	0.00
20	Penjualan Gedung dan Bangunan	0.00	0.00
21	Penjualan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0.00	0.00
22	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00
23	Penjualan Aset Lainnya	0.00	0.00
24	Penerimaan dari Divestasi	0.00	0.00
25	Penjualan Investasi Non Permanen	0.00	0.00
26	*Jumlah Arus Kas Masuk (18 s.d 25)*	**0.00**	**0.00**
27	*Arus Kas Keluar*		
28	Perolehan Tanah	0.00	0.00
29	Perolehan Peralatan dan Mesin	6,781,904,053.00	6,687,428,829.00
30	Perolehan Bangunan dan Gedung	0.00	7,799,433,383.32
31	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00
32	Perolehan Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00
33	Perolehan Aset Lainnya	0.00	4,119,500,000.00
34	Pengeluaran Penyertaan Modal	0.00	0.00
35	Pengeluaran Investasi Non Permanen	0.00	0.00
36	Konstruksi dalam Pengerjaan	0.00	0.00
37	*Jumlah Arus Kas Keluar (28 s/d 36)*	**6,781,904,053.00**	**18,606,362,212.32**
38	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan (26-37)**	**(6,781,904,053.00)**	**(18,606,362,212.32)**
39	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan dan Pembiayaan**		
40	*Arus Kas Masuk*		
41	Penerimaan Pinjaman	0.00	0.00
42	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain	0.00	0.00
43	*Jumlah Arus Kas Masuk (41 s/d 42)*	**0.00**	**0.00**
44	*Arus Kas Keluar*		
45	Pembayaran Pokok Pinjaman	0.00	0.00
46	Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain	0.00	0.00
47	Penyetoran ke Kas Daerah	0.00	0.00
48	*Jumlah Arus Kas Keluar (45 s/d 47)*	**0.00**	**0.00**
49	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan dan Pembiayaan (43-48)**	**0.00**	**0.00**
50	**Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran**		
51	*Arus Kas Masuk*		
52	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00
53	*Jumlah Arus Kas Masuk (52)*	**0.00**	**0.00**
54	*Arus Kas Keluar*		
55	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TAHUN ANGGARAN 2025

1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	**303,191,076,362.99**	**338,607,432,487.55**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**(113,749,325,507.05)**	**(154,280,428,744.22)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	-	1,720,510,473.24
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	0.00
Koreksi Ekuitas Lainnya	(33,590,793,047.00)	(2,060,363,191.35)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	**118,368,686,536.00**	**119,203,925,337.77**
EKUITAS AKHIR	**274,159,644,344.94**	**303,191,076,362.99**

Tanjungpinang, Mei 2026

DIREKTUR RSUD RAJA AHMAD TABIB

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dr. BAMBANG UTOYO, M.A.P

NIP. 196101282009041003

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
RSUD RAJA AHMAD TABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1A Tahun 2014 tanggal 1 Januari 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Provinsi Kepulauan Riau, telah menerapkan sistem Pengelolaan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yaitu sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Penyusunan Laporan keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), terutama pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Laporan Keuangan ini terdiri atas :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1. Sarana pertanggungjawaban dari Pimpinan RSUD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan APBD dan BLUD untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dengan fleksibilitas yang telah ditetapkan.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Pendapatan - LO; dan
7. Beban.

B. Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (*subsequent event*) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2026.

C. Penanggung Jawab Laporan Keuangan

Laporan Keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah tanggung jawab RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau.

D. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024;

23. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
24. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025
26. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan

E. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Laporan Keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- B. Periode Pelaporan Keuangan;
- C. Penanggung Jawab Laporan Keuangan;
- D. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- E. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

Bab II Profil SKPD
- A. Sumber Daya
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Program dan Kegiatan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2025
- A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025
- B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- A. Entitas Pelaporan
- B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan
- C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
F. Kebijakan Akuntansi Belanja
G. Kebijakan Akuntansi Persediaan
H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
I. Kebijakan Akuntansi

Kewajiban Bab V Penjelasan Pos-pos

Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

A. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Pelaporan Bab VII Penutup

BAB II

PROFIL SKPD

A. Sumber Daya RSUD Raja Ahmad Tabib

Sumber daya yang dimiliki oleh RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas sumber daya manusia dan sumber daya aset yang dijabarkan secara rinci, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada tahun 2025, RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau memiliki sumber daya manusia (SDM) sejumlah 942 orang yang terdiri atas:

Tabel 2.1.

Jumlah SDM RSUD Raja Ahmad Tabib

No.	Profesi	Jumlah SDM
1	Direktur	1
2	Wadir Yanmed Dan Keperawatan	1
3	Wadir Penunjang Dan Pendidikan Pelatihan	1
4	Wadir Umum Dan Keuangan	1
5	Kabid Yanmed	1
6	Kabid Keperawatan	1
7	Kabid Penunjang Medik Dan Non Medik	1
8	Kabid Pendidikan Pelatihan Dan Penelitian Pengembangan	1
9	Kabag Umum	1
10	Kabag Perencanaan	1
11	Kabag Keuangan	1
12	Subbag Tata Usaha Dan Rumah Tangga	1
13	Subbag Penyusunan Program Dan Anggaran	1
14	Sub Spesialis Bedah Onkologi	1
15	Dokter Spesialis	61
16	Dokter Umum	34
17	Dokter Gigi	1
18	Perawat	278
19	Bidan	89
20	Perawat Gigi	4
21	Penata Anestesi	4
22	Fisioterapi	9
23	Apoteker	21
24	Asisten Apoteker	15
25	Pranata Laboratorium Kesehatan	22

No.	Profesi	Jumlah SDM
26	Teknisi Transfusi Darah	3
27	Radiografer	18
28	Elektromedik	7
29	Terapis Wicara	3
30	Psikolog Klinis	1
31	Refraksionis	1
32	Nutrisionis	6
33	Sanitarian	4
34	Pembimbing K3	1
35	Pengendali Dampak Lingkungan	1
36	Epidemiolog Kesehatan	1
37	Fisikawan Medis	2
38	Perekam Medis	13
39	Bidang Pelayanan Medik	52
40	Bidang Keperawatan	22
41	Bidang Penunjang Medik Dan Non Medik	105
42	Bidang Pendidikan Dan Pelatihan	10
43	Bagian Umum	23
44	Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga	39
45	Bagian Perencanaan	15
46	Sub Bagian Penyusunan Program Dan Anggaran	5
47	Bagian Keuangan	58
Jumlah		**942**

Berdasarkan Tabel 2.1 pada tahun 2025 jumlah SDM RSUD Raja Ahmad Tabib sebanyak 942 orang. Dengan tenaga kesehatan sebanyak 600 orang dan tenaga non kesehatan sebanyak 342 orang. Dengan jenis profesi terbanyak, yaitu perawat sebanyak 278 orang.

2. Sumber Daya Aset

Sarana dan prasarana yang ada di RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau cukup memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berikut ini daftar aset yang dikelola sampai dengan tahun 2025:

Tabel 2.2.

Daftar Aset yang Dikelola RSUD Raja Ahmad Tabib

NO	NAMA BARANG	SAT.	JUMLAH
1.	**Tanah**		
2.	**Peralatan dan Mesin**		
2.1.	Alat-alat Besar	Unit	18
2.2.	Alat-alat Angkutan	Unit	30
2.3.	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Unit	266
2.4.	Alat-alat Pertanian / Peternakan	Unit	25
2.5.	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Unit	3729
2.6.	Alat-alat Studio dan Komunikasi	Unit	286
2.7.	Alat-alat Kedokteran	Unit	3871
2.8.	Alat-alat Laboratorium	Unit	655
2.9.	Alat-alat Keamanan	Unit	21
3.	**Gedung dan Bangunan**		
3.1	Bangunan Gedung	Unit	52
3.2	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Unit	1
4.	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**		
4.1.	Bangunan Air / Irigasi	Unit	13
4.2.	Instalasi	Unit	3
4.3.	Jaringan	Unit	12
5.	**Aset Tetap Lainnya**		
5.1.	Buku Perpustakaan	Unit	718
5.2.	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	Unit	54
5.3.	Hewan Ternak dan Tumbuh- Tumbuhan	Unit	131

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun mendatang, secara rinci dapat dilihat melalui Tabel berikut ini:

Tabel 2.3.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RSUD Raja Ahmad Tabib

VISI (Gubernur Kepulauan Riau): "Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya"
MISI (Gubernur Kepulauan Riau) ke - 3: Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing Dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	Meningkatnya kesehatan keluarga dan lingkungan sehat	• Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi • Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda • Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	• Meningkatkan Kesehatan Masyarakat • Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (*Continue of Care*) • Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan.
	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan faktor risiko penyakit menular dan tidak menular	Meningkatkan Pengendalian Penyakit

	Meningkatnya pemenuhan Sumber Daya Kesehatan sesuai standar	• Penguatan pelaksanaan JKN • Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan	• Meningkatkan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan • Meningkatkan akses, mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (*Primary Health Care*) Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan

C. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.4.

Anggaran dan Realisasi Tahun 2025

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5
I	**SUMBER DANA BLUD**	**164.103.369.169,00**	**144.330.679.474,93**	**19.772.689.694,07**
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BLUD**			
1	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BLUD	231.374.000,00	226.877.772,00	4.496.228,00
2	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan BLUD	64.000.000,00	58.029.877,00	5.970.123,00
3	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	695.016.000,00	627.487.825,00	67.528.175,00
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.046.000.000,00	886.594.744,00	159.405.256,00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Dan/Atau BLUD	421.284.000,00	371.022.452,00	50.261.548,00
6	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	213.050.000,00	212.528.710,00	521.290,00
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	95.000.000,00	66.620.895,00	28.379.105,00
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.925.126.957,00	64.165.862.235,68	1.759.264.721,32
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	185.000.000,00	150.882.637,00	34.117.363,00
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	8.857.141.410,00	8.226.556.865,00	630.584.545,00
11	Pelayanan Medik Umum	3.852.903.832,00	3.756.633.957,25	96.269.874,75
12	Pelayanan Farmasi	31.550.509.528,00	23.741.888.541,00	7.808.620.987,00
13	Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan Alat Kesehatan	1.211.006.000,00	1.038.548.609,00	172.457.391,00
14	Pelayanan Nonmedik Lainnya	2.671.950.000,00	2.406.071.987,00	265.878.013,00
15	Pengelolaan Data Dan Informasi Kesehatan	515.000.000,00	458.932.569,00	56.067.431,00
16	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	468.034.500,00	466.324.344,00	1.710.156,00
17	Penyiapan Perumusan Dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	150.000.000,00	140.529.194,00	9.470.806,00

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
18	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat	193.740.800,00	123.548.070,00	70.192.730,00
19	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	147.170.000,00	142.167.812,00	5.002.188,00
20	Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	315.000.000,00	314.553.720,00	446.280,00
21	Pengadaan Bahan Habis Pakai	45.295.062.142,00	36.749.016.659,00	8.546.045.483,00
TOTAL		**164.103.369.169,00**	**144.330.679.474,93**	**19.772.689.694,07**

Jumlah Anggaran BLUD pada tabel di atas adalah Rp164.103.369.169,00, sementara jumlah anggaran menurut Laporan Realisasi Anggaran adalah Rp140.001.527.999,00. Terdapat selisih sebesar Rp24.101.841.170,00, hal tersebut dikarenakan adanya Pergeseran Rencana Bisnis Dan Anggaran Ambang Batas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau yang tidak tercatat pada Laporan Realisasi Anggaran SIPD RI dikarenakan suatu kendala. Pergeseran Rencana Bisnis Dan Anggaran Ambang Batas tersebut dapat di buktikan dalam Keputusan Direktur Nomor 656/SK-RSUD-RAT/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025.

Secara aturan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, terutama pada:

1. Pasal 91 ayat (1): Menyatakan bahwa belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan melampaui nominal biaya yang ditetapkan dalam RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), dengan syarat belanja tersebut didasarkan pada pendapatan yang melebihi target.
2. Pasal 91 ayat (2): Menjelaskan bahwa fleksibilitas ini hanya berlaku untuk belanja BLUD yang bersumber dari Pendapatan Asli BLUD (Jasa Layanan), bukan dari rupiah murni (APBD/Hibah terikat).
3. Pasal 92: Menegaskan bahwa fleksibilitas tersebut dilaksanakan sesuai dengan Ambang Batas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah (Pergub/Perwali/Perbup).

Berdasarkan Pergub nomor 52 tahun 2020 tentang pengelolaan dan penatausahaan BLUD, kondisi ini dibenarkan dan sah, karena:

1. Kelebihan belanja tersebut digunakan untuk menunjang operasional pelayanan (misal: obat-obatan atau BHP karena jumlah pasien meningkat).

2. Pendapatan fungsional RSUD pada tahun berjalan juga melampaui target minimal sebesar selisih belanja tersebut.
3. Persentase kelebihan (2,93%) masih berada dalam rentang persentase ambang batas yang ditetapkan dalam Pergub tersebut, tepatnya pasal 29 (3). Besaran ambang batas maksimal 30%. Secara administratif masih jauh di bawah limit maksimal ambang batas.

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
II	**SUMBER DANA APBD**	**126.419.829.530,00**	**118.319.361.536,00**	**8.100.467.994,00**
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemagkat Daerah (RSUD RAT)	23.357.410,00	20.360.508,00	2.996.902,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	94.993.527.681,15	93.862.968.604,00	1.130.559.077,15
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	746.791.262,00	743.048.000,00	3.743.262,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.739.920,00	95.207.000,00	5.532.920,00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.828.600,00	32.726.578,00	30.102.022,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
6	Pengadaan Mebel	201.019.685,00	197.080.500,00	3.939.185,00
7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.060.986.564,00	3.993.318.463,00	67.668.101,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.004.150,00	7.081.750,00	922.400,00
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.647.729.568,91	5.998.972.808,00	648.756.760,91
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.036.234.519,59	3.986.187.691,00	50.046.828,59
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah			
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.650.000,00	83.025.000,00	625.000,00
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.000.000,00	175.500.000,00	500.000,00
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	901.330.680,82	353.956.000,00	547.374.680,82

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
B	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
14	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	3.080.582.190,00	2.308.529.182,00	772.053.008,00
15	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	3.177.048.000,00	3.043.898.000,00	133.150.000,00
16	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	3.139.674.851,00	244.758.856,00	2.895.115.995,00
17	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.806.574.623,87	65.823.000,00	1.740.751.623,87
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Secara Terintegrasi			
18	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	233.958.876,00	176.241.500,00	57.717.376,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			
19	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.939.590.947,66	2.930.678.096,00	8.912.851,66
	TOTAL	**126.419.829.530,00**	**118.319.361.536,00**	**8.100.467.994,00**

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

A. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan mencerminkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja keuangan dan ketaatan atas pelaksanaan anggaran tahun 2025 dengan membandingkan anggaran dan realisasinya.

1. Pencapaian Target Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib.

Pencapaian target pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib menurut klasifikasi jenis pendapatan untuk tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Pendapatan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4.	PENDAPATAN			
4.1.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**258.467.126.274,00**	**263.093.577.020,57**	**101,79**
	Pendapatan dari APBD	118.465.598.275,00	118.319.361.536,00	99,88
4.1.02.	Retribusi Daerah	139.172.026.866,00	143.676.589.791,00	103,24
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	829.501.133,00	1.097.625.693,57	132,32

Jenis pendapatan yang diterima oleh RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau dalam pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2025, terdiri dari Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah, dimana dari anggaran pendapatan yang ditargetkan tahun 2025 sebesar Rp258.467.126.274,00 tercapai sebesar Rp263.093.577.020,57 dengan persentase 101,79%.

Selain itu juga terdapat Pendapatan yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau, yaitu dengan target sebesar Rp118.465.598.275,00 dan realisasi sebesar Rp118.319.361.536,00 dengan persentase 99,88%.

2. Pencapaian Target Belanja RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2025

Pencapaian target belanja RSUD Raja Ahmad Tabib menurut klasifikasi jenis belanja untuk tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Pencapaian Target Belanja

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.	**BELANJA DAERAH**	**266.643.813.304,00**	**262.650.041.010,93**	**98,50**
5.1.	**BELANJA OPERASI**	**257.387.351.565,00**	**253.868.136.957,93**	**98,63**
5.1.01.	Belanja Pegawai	119.993.527.681,15	127.306.623.672,00	106,09
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	137.393.823.883,85	126.561.513.285,93	92,12
5.2.	**BELANJA MODAL**	**9.256.461.739,00**	**8.781.904.053,00**	**94,87**
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.054.441.739,00	8.781.904.053,00	96,99
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	202.020.000,00	0,00	0,00
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan pencapaian kinerja belanja daerah berdasarkan jenis belanja seperti dalam tabel di atas, menunjukkan daya serap anggaran yang cukup tinggi. Dari anggaran belanja yang disediakan Tahun 2025 sebesar Rp266.643.813.304,00 terserap sebesar Rp262.650.041.010,93 atau 98,50%.

3. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target, antara lain:

1) Adanya keterlambatan dalam penyampaian SPJ ke bagian keuangan;
2) Tidak tersedianya kas daerah di akhir tahun hingga terdapat beberapa kegiatan yang menjadi utang belanja di tahun 2026.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Pelaporan

RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Sebagai entitas pelaporan RSUD Raja Ahmad Tabib belum menyusun Kebijakan Akuntansi sendiri. Kebijakan Akuntansinya masih mengacu kepada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024. Padahal sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan bahwa:

- Pasal 99 ayat (4)

  Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- Pasal 99 ayat (5)

  BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

1. Asumsi kemandirian entitas;
2. Asumsi kesinambungan entitas; dan
3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Basis kas untuk pengakuan pengukuran Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Basis akrual untuk pengakuan pengukuran dalam Pos-pos Neraca yang terdiri dari pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana;
3. Basis akrual untuk pengakuan pengukuran Laporan Operasional yang terdiri dari Pendapatan - LO dan Beban.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di kas RSUD Raja Ahmad Tabib, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah RSUD Raja Ahmad Tabib.

Tidak ada pengakuan laba/rugi, melainkan dengan istilah sisa lebih/kurang perhitungan anggaran (SiLPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran merupakan selisih antara realisasi penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dengan pengeluaran belanja dan pengeluaran pembiayaan.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan

Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib, adalah sebagai berikut:

1) Pengukuran Pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;

2) Aset dicatat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
3) Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
4) Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, oleh karena itu angka-angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip-prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib yang Wajar.

E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua pendapatan yang diterima oleh RSUD Raja Ahmad Tabib yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak RSUD Raja Ahmad Tabib, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan pendapatan yang diterapkan oleh RSUD Raja Ahmad Tabib dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Pendapatan-LRA diakui pada saat pendapatan kas yang diterima RSUD Raja Ahmad Tabib diakui sebagai pendapatan oleh Bendahara Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pendapatan - LO diakui pada saat:

1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
   a. Timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
   b. Timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
2) Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
   a. Pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
   b. Pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).

Pendapatan - LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan - LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

F. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Kebijakan akuntansi atas belanja yang diterapkan oleh RSUD Raja Ahmad Tabib dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah belanja diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh RSUD Raja Ahmad Tabib disahkan oleh Bendahara Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran, yaitu klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah–LRA.

G. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional RSUD Raja Ahmad Tabib, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh RSUD Raja Ahmad Tabib dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki untuk kegiatan swakelola dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, dan tidak diakui sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *Stock Opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak, diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:

a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Pada akhir periode dilakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil

perhitungan fisik, maka diunggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

RSUD Raja Ahmad Tabib belum sepenuhnya menerapkan kebijakan akuntansi Persediaan di atas, khususnya metode pencatatan belum sepenuhnya menerapkan metode perpetual. Pencatatan persediaan masih menggunakan metode periodik untuk seluruh item barang persediaan. Hal ini dapat mengakibatkan sistem pengendalian intern persediaan barang di RSUD Raja Ahmad Tabib menjadi kurang memadai karena pengendalian (*control*) mutasi persediaannya hanya ada pada Bagian Gudang, sementara Bagian Akuntansi tidak bisa mengontrol mutasi persediaan yang ada di Bagian Gudang.

H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD Raja Ahmad Tabib atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
6. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
7. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
8. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

I. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya diklasifikasikan ke dalam Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Tagihan Jangka Panjang merupakan tagihan yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan kerja sama antara RSUD Raja Ahmad Tabib dengan pihak lain dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang- undangan.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat berupa :

- Sewa, yang diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
- Kerjasama pemanfaatan, yaitu pendayagunaan barang milik RSUD Raja Ahmad Tabib oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya-KSP.
- Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk Kerjasama berupa pemanfaatan aset RSUD Raja Ahmad Tabib oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada RSUD Raja Ahmad Tabib setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
- Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset RSUD Raja Ahmad Tabib oleh pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada RSUD Raja Ahmad Tabib untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau dinikmati oleh entitas; dan
- Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset Lain-Lain antara lain terdiri dari aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif direklasifikasi ke dalam aset ain-lain, dan Kas Yang Dibatasi Penggunannya.

Aset tetap yang dihentikan penggunaannya dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

J. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
3. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.
4. Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*).
b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*).
c. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah (*government related events*).
d. Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-knowledge events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika RSUD Raja Ahmad Tabib menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika RSUD Raja Ahmad Tabib berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan.

Dalam kejadian yang berkaitan dengan RSUD Raja Ahmad Tabib, kewajiban diakui ketika RSUD Raja Ahmad Tabib berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi RSUD Raja Ahmad Tabib dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas RSUD Raja Ahmad Tabib.

Dalam kejadian yang diakui RSUD Raja Ahmad Tabib, kewajiban diakui ketika RSUD Raja Ahmad Tabib memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan RSUD Raja Ahmad Tabib yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi RSUD Raja Ahmad Tabib.

BAB V

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1.1. Pendapatan-LRA

RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau merealisasikan pendapatan tahun anggaran 2025 sebesar Rp263.093.577.020,57 atau 101,79% dari anggaran sebesar Rp258.467.126.274,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	**PENDAPATAN - LRA**	**258.467.126.274,00**	**263.093.577.020,57**	**101,79**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**140.001.527.999,00**	**144.774.215.484,57**	**103,41**
1.1.1.	**Retribusi Daerah-LRA**	**139.172.026.866,00**	**143.676.589.791,00**	**103,24**
1.1.1.01.	Retribusi Jasa Umum	138.984.348.266,00	143.480.268.991,00	103,23
1.1.1.02.	Retribusi Jasa Usaha	187.678.600,00	196.320.800,00	104,60
1.1.2.	**Lain-lain Pendapatan yang sah**	**829.501.133,00**	**1.097.625.693,57**	**132,32**
1.2.	**Pendapatan APBD-LRA**	**118.465.598.275,00**	**118.319.361.536,00**	**93,59**

1.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LRA

Realisasi Pendapatan Asli Daerah RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2025 sebesar Rp144.774.215.484,57 atau 103,41% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp140.001.527.999,00. Penjelasan atas realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2025 sebesar Rp143.676.589.791,00 atau 103,24% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp139.172.026.866,00. Rincian pendapatan retribusi daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 5.2.

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun 2025

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	**Retribusi Daerah**	**139.172.026.866,00**	**143.676.589.791,00**	**103,24**
1.1.	**Retribusi Jasa Umum**	138.984.348.266,00	143.480.268.991,00	103,23
1.1.1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	138.984.348.266,00	143.480.268.991,00	103,23
1.2.	**Retribusi Jasa Usaha**	187.678.600,00	196.320.800,00	104,60
1.2.1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	181.903.600,00	187.170.800,00	102,90
1.2.2.	Retribusi Tempat Penginapan	5.775.000,00	9.150.000,00	158,44

1.1.1.2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp1.097.625.693,57 atau 132,32% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp829.501.133,00. Rincian pendapatan asli daerah sebagai berikut :

Tabel 5.3.

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA Tahun 2025

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	**Lain-lain Pendapatan yang sah**	**829.501.133,00**	**1.097.625.693,57**	**132,32**
1.1.	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**0,00**	**1.480.970,00**	**0,00**
1.2	**Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan**	**0,00**	**341.518,00**	**0,00**
1.3	**Pendapatan dari Pengembalian**	**27.889.200,00**	**98.544.952,05**	**353,34**
1.3.1.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD	27.889.200,00	98.544.952,05	353,34
1.4.	**Pendapatan BLUD**	**801.611.933,00**	**997.268.253,52**	**124,41**
1.4.1.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	706.336.982,00	861.645.442,00	121,99
1.4.3.	Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	95.274.951,00	135.612.811,52	142,34

1.1.2. Pendapatan APBD-LRA

Realisasi Pendapatan APBD-LRA RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2025 sebesar Rp118.319.361.536,00 atau 93,59% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp126.419.829.530,00.

1.2. Belanja

Anggaran dan realisasi belanja RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2025, berdasarkan klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.

Realisasi Belanja Tahun 2025

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	**BELANJA**	**266.643.813.304,00**	**262.650.041.010,93**	**98,50**
1.1.	**Belanja Operasi**	**257.387.351.565,00**	**253.868.136.957,93**	**98,63**
1.1.1.	Belanja Pegawai	119.993.527.681,15	127.306.623.672,00	106,09
1.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	137.393.823.883,85	126.561.513.285,93	92,12
1.2.	**Belanja Modal**	**9.256.461.739,00**	**8.781.904.053,00**	**94,87**
1.2.1.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.753.058.361,00	4.625.616.383,00	97,32
1.2.2.	Belanja Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.183.471,00	11.548.440,00	94,79
1.2.3.	Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.176.298.000,00	3.043.298.000,00	95,81
1.2.4.	Belanja Alat Laboratorium	7.649.010,00	7.300.000,00	95,44
1.2.5.	Belanja Komputer	530.252.897,00	468.013.500,00	88,26
1.2.6.	Belanja Peralatan dan Mesin	575.000.000,00	626.127.730,00	108,89
1.2.7.	Belanja Gedung dan Bangunan	202.020.000,00	0,00	0,00
1.2.8.	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00

1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2025 sebesar Rp253.868.136.957,93 atau 98,63% dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp257.387.351.565,00. Penjelasan atas realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 sebagai berikut:

1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2025 sebesar Rp127.306.623.672,00 atau 106,09% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp119.993.527.681,15, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**35.118.615.159,67**	**34.707.327.049,00**	**98,83**
1.1.	Belanja Gaji Pokok ASN	25.726.845.627,32	25.533.801.386,00	99,25
1.2.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	2.047.012.350,88	1.994.642.109,00	97,44
1.3.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	179.999.999,90	176.635.000,00	98,13
1.4.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	2.696.000.000,00	2.632.567.998,00	97,65
1.5.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	358.089.301,99	330.955.000,00	92,42
1.6.	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.436.716.000,04	1.410.958.860,00	98,21
1.7.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	21.999.999,98	17.026.565,00	77,39
1.8.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	469.999,48	416.883,00	88,70
1.9.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	2.422.481.881,02	2.389.900.644,00	98,66
1.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	58.999.999,04	55.105.921,00	93,40
1.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	170.000.000,02	165.316.683,00	97,25
2.	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**59.874.912.521,48**	**59.155.641.555,00**	**98,80**
2.1.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	26.545.912.521,52	26.304.296.658,00	99,09
2.2.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.055.000.000,08	3.011.102.723,00	98,56
2.3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	7.946.999.999,96	7.741.128.743,00	97,41
2.4.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	22.326.999.999,92	22.099.113.431,00	98,98
3.	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00
4.	**Belanja Pegawai BLUD**	**25.000.000.000,00**	**33.443.655.068,00**	**133,77**
4.1.	Belanja Pegawai BLUD	25.000.000.000,00	33.443.655.068,00	133,77
	Jumlah Belanja Pegawai	**119.993.527.681,15**	**127.306.623.672,00**	**106,09**

Berdasarkan realisasi belanja pegawai RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2025 sebesar Rp127.306.623.672,00 atau sebesar 106,09% yang terdiri dari :

a. Belanja Pegawai bersumber dari APBD sebesar Rp93.862.968.604,00
b. Belanja Pegawai bersumber dari BLUD sebesar Rp33.443.655.068,00

1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2025 sebesar Rp126.561.513.285,93 atau 92,11% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp137.393.823.883,85.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

Tabel 5.6.

Realisasi Barang dan Jasa Tahun 2025

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	**Belanja Barang**	**5.339.058.630,69**	**645.856.258,00**	**12,10**
1.1.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00
1.2.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	454.440.000,00	454.440.000,00	100,00
1.3.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.961.822.000,00	65.623.000,00	2,22
1.4.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00
1.5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.251.190,00	2.900.000,00	89,20
1.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	46.843.788,00	41.531.995,00	85,03

1.7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.726.043,00	17.951.895,00	72,60
1.8.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.502.400,00	1.960.000,00	78,32
1.9.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	6.333.729,82	0,00	0,00
1.10.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	62.655.478,00	61.249.368,00	97,76
1.11.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00
1.12.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	37.773.300,00	0,00	0,00
1.13.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.14.	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.736.710.701,87	0,00	0,00
1.15.	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.16.	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.17.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00
1.18.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00	0,00
2.	**Belanja Jasa**	**14.904.497.552,16**	**14.146.782.623,00**	**94,92**
2.1.	Belanja Jasa Kantor	14.459.931.684,91	13.767.216.911,00	95,21
2.2.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	312.358.207,25	292.804.540,00	93,74
2.3.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
2.4.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	132.207.660,00	86.741.172,00	65,61
2.5.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00
3.	**Belanja Pemeliharaan**	**2.434.011.927,00**	**1.470.677.150,00**	**60,42**
3.1.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.735.995.600,00	1.077.044.100,00	62,04
3.2.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	698.016.327,00	393.633.050,00	56,39
4.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**67.272.000,00**	**37.320.578,00**	**55,48**
4.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67.272.000,00	37.320.578,00	55,48
4.2.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00
5.	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**114.648.983.774,00**	**110.260.896.676,93**	**96,17**
5.1.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	114.648.983.774,00	110.260.896.676,93	96,17

Jumlah Belanja Barang dan Jasa	**137.393.823.883,86**	**126.561.513.285,93**	**92,11**

Berdasarkan realisasi belanja barang dan jasa RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2025 sebesar Rp126.561.513.285,93 atau sebesar 92,11% yang terdiri dari :

a. Belanja Barang dan Jasa bersumber dari APBD sebesar Rp16.300.616.609,00
b. Belanja Barang dan Jasa bersumber dari BLUD sebesar Rp110.260.896.676,93

1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2025 sebesar Rp8.781.904.053,00 atau 94,87% dari anggaran belanja modal yang disediakan sebesar Rp9.256.461.739,00. Belanja Modal Tahun 2025 terdiri dari: Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal Aset Lainnya.

1.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2025 sebesar Rp8.781.904.053,00 atau 96,99% dari anggaran belanja peralatan dan mesin yang disediakan sebesar Rp9.054.441.739,00.

Tabel 5.7.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.753.058.361,00	4.625.616.383,00	97,32
2	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.183.471,00	11.548.440,00	94,79
3	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.176.298.000,00	3.043.298.000,00	95,81
4	Belanja Modal Alat Laboratorium	7.649.010,00	7.300.000,00	95,44
5	Belanja Modal Komputer	530.252.897,00	468.013.500,00	88,26
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	575.000.000,00	626.127.730,00	108,89
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**9.054.441.739,00**	**8.781.904.053,00**	**96,99**

Berdasarkan realisasi belanja modal peralatan dan mesin RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2025 sebesar Rp8.781.904.053,00 yang terdiri dari :

a. Belanja modal peralatan dan mesin yang bersumber dari APBD sebesar Rp8.155.776.323,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin yang bersumber dari RBA BLUD sebesar Rp626.127.730,00

1.2.2.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Pada tahun 2025 ini tidak terealisasinya belanja Gedung dan Bangunan RSUD Raja Ahmad Tabib atau 0,00% dari anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang disediakan sebesar Rp202.020.000,00. Tidak terealisasinya belanja Gedung dan Bangunan ini dikarenakan belanja tersebut masuk kedalam belanja tunda bayar. Yaitu belanja yang akan direalisasikan di tahun 2026.

1.2.2.3. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Lainnya sampai siap pakai.

Belanja Aset Lainnya RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2025 tidak

dibelanjakan dikarenakan tidak ada anggaran untuk belanja tersebut.

1.3. Surplus/Defisit

Surplus terjadi apabila realisasi Pendapatan Daerah lebih besar dari pada realisasi Belanja Daerah. Sebaliknya, Defisit terjadi apabila realisasi Pendapatan Daerah lebih kecil dari pada realisasi Belanja Daerah.

Pada tahun 2025 terjadi surplus sebesar Rp443.536.009,64, dimana Pendapatan Daerah sebesar Rp263.093.577.020,57 dan Belanja Daerah sebesar Rp262.650.041.010,93. sementara pada tahun 2024 terjadi Defisit sebesar Rp16.519.622.295,31, dimana Pendapatan Daerah sebesar Rp235.316.966.318,01 dan Belanja Daerah sebesar Rp251.836.588.613,32.

1.4. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pada tahun 2025 terdapat penerimaan pembiayaan yang berasal dari dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, yaitu sebesar Rp222.455.773,93, dan pada tahun 2024 sebesar Rp16.742.078.069,24. Sementara pengeluaran pembiayaan baik tahun 2024 maupun 2023 nihil.

Penerimaan pembiayaan digunakan seluruhnya untuk menutup defisit anggaran tahun berjalan.

1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan- LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

Pada tahun 2025 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar

Rp665.991.783,57, dan pada tahun 2024 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp222.455.773,93.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLU menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

Tabel 5.8

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun

NO.	URAIAN	2025	2024
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	222.455.773,93	16.742.078.069,24
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(222.455.773,93)	(16.742.078.069,24)
3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	665.991.783,57	222.455.773,93
4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
5	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	**665.991.783,57**	**222.455.773,93**

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 sebesar Rp16.742.078.069,24 sedangkan Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2025 sebesar Rp222.455.773,93 berasal dari Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024.

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan tahun 2024 sebesar Rp16.742.078.069,24, sedangkan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan tahun 2025 sebesar Rp222.455.773,93, sama dengan Saldo Awalnya, artinya semua dana yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun digunakan untuk pembiayaan tahun berjalan sehingga dana tahun lalu tidak ada sisanya lagi.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan untuk tahun 2025 sebesar Rp665.991.783,57 dan untuk tahun 2024 sebesar Rp222.455.733,93.

Tidak ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 menjadi sebesar Rp665.991.783,57, dan tahun 2024 sebesar Rp222.455.733,65.

3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana tanggal tertentu.

Posisi keuangan dalam Neraca RSUD Raja Ahmad Tabib pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 secara umum sebagai berikut:

Tabel 5.9

Neraca

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
1	Aset	308.278.723.181,94	333.738.368.415,99
2	Kewajiban	34.119.078.837,00	30.547.292.053,00
3	Ekuitas	274.159.644.344,94	303.191.076.362,99

3.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dapat dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset RSUD Raja Ahmad Tabib per 31 Desember 2025 sebesar Rp308.278.723.181,94 atau mengalami penurunan sebesar Rp25.459.645.234,05 dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp333.738.368.415,99.

Rincian Aset RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.10

Aset

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
1	Aset Lancar	19.738.233.902,03	21.683.446.667,45
2	Aset Tetap	282.769.214.279,85	306.272.971.748,48
3	Aset Lainnya	5.771.275.000,06	5.781.950.000,06
	Jumlah	**308.278.723.181,94**	**333.738.368.415,99**

3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Nilai Aset lancar RSUD Raja Ahmad Tabib per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.738.233.902,03 sedangkan nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.683.446.667,45, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11

Aset Lancar

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
1	Kas dan Setara Kas	665.991.783,57	222.455.773,93
2	Piutang	4.192.230.808,00	10.940.874.023,00
3	Penyisihan Piutang	(2.459.472.357,05)	(2.423.273.270,46)
4	Beban Dibayar Dimuka	0,00	55.742.777,78
5	Persediaan	17.339.483.667,51	12.887.647.363,20
	Jumlah	**19.738.233.902,03**	**21.683.446.667,45**

3.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening RSUD Raja Ahmad Tabib dan kas tunai yang disimpan oleh Bendahara RSUD Raja Ahmad Tabib.

Pengukuran Kas dan Setara Kas berdasarkan realisasi dari penerimaan kas di rekening RSUD Raja Ahmad Tabib, dan realisasi pengeluaran kas berdasarkan jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening RSUD Raja Ahmad Tabib, dengan menggunakan nilai historis dan satuan mata uang rupiah.

Pengakuan atas kas di bendahara pengeluaran, dilakukan manakala penerimaan kas telah benar-benar masuk ke rekening kas bendahara pengeluaran dan pengeluaran kas telah keluar dari rekening bendahara pengeluaran.

Kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp665.991.783,57 yang terdiri dari:

Tabel 5.12

Kas dan Setara Kas

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2025
1	Kas Bendahara Pengeluaran BLUD (BRK Rek No. 1800180180)	0,00
2	Kas Pejabat Keuangan (BRK Rek No. 1800101010)	576.773.806,29
3	Kas Penerimaan BLUD (BSI Rek.No.9988997886) Rekening sudah di tutup bulan Februari 2025	0,00
4	Kas Penerimaan BLUD (BRK Rek.No.1030101920)	69.555.727,28
5	Tunai	19.662.250,00
	Jumlah	**665.991.783,57**

3.1.1.2. Piutang

Piutang yang dimiliki RSUD Raja Ahmad Tabib per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.192.230.808,00, terdiri dari Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp4.186.687.864,00 dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp5.542.944,00, dengan rincian:

Tabel 5.13

Piutang

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2025
1	JKN - BPJS KESEHATAN	55.810.000,00
2	JKN PARSIAL RSUD KOTA TANJUNGPINANG	30.212.000,00
3	PT BRC	2.853.950,00
4	KIMIA FARMA	13.980.000,00
5	PT. INHEALTH	14.147.699,00
6	JAMKESDA PROV. KEPRI	307.503.000,00
7	PT. AIR NAV INDONESIA	9.170.600,00
8	BPJS KETENAGAKERJAAN	381.246.875,00
9	PT. TASPEN	45.853.150,00
10	PT. JASA RAHARJA	110.176.800,00
11	PT. MEITECH	421.906.000,00
12	DEPT KESEHATAN KEMENKES RI	16.646.988,00
13	PT. NAYAKA ERA HUSADA	1.885.700,00
14	PT. PELINDO I	1.186.350,00
15	PIUTANG UMUM TAHUN 2014	84.213.253,00
16	PIUTANG UMUM TAHUN 2015	269.374.393,00
17	PIUTANG UMUM TAHUN 2016	648.320.728,00
18	PIUTANG UMUM TAHUN 2017	588.749.173,00
19	PIUTANG UMUM TAHUN 2018	316.902.849,00
20	PIUTANG UMUM TAHUN 2019	296.297.150,00
21	PIUTANG UMUM TAHUN 2020	83.641.215,00
22	PIUTANG UMUM TAHUN 2021	114.027.390,00
23	PIUTANG UMUM TAHUN 2022	54.608.076,00

24	PIUTANG UMUM TAHUN 2023	51.486.005,00
25	TAMBAHAN PIUTANG UMUM (2021) - LHP Inspektorat 2023	56.856.971,00
26	TAMBAHAN PIUTANG UMUM (2022) - LHP Inspektorat 2023	5.964.747,00
27	TAMBAHAN PIUTANG UMUM (2023) - LHP Inspektorat 2023	73.514.634,00
28	PIUTANG UMUM TAHUN 2024	17.303.326,00
29	PIUTANG UMUM TAHUN 2025	6.433.450,00
30	SEWA LOKET KIMIA FARMA	15.000.000,00
31	SEWA KANTIN RODIAH	3.750.000,00
32	SEWA KANTIN BU RINA	2.050.000,00
33	SEWA LAHAN DEWE MART LT.1 RSUD RAT	17.152.000,00
34	SEWA LAHAN KDH UNTUNG SABUT (KOPI DARI HATI) - 2025	68.463.392,00
35	KDH UNTUNG SABUT (KOPI DARI HATI)	5.542.944,00
	Jumlah	**4.192.230.808,00**

Metode pencatatan Piutang BLUD khususnya Piutang terhadap BPJS Kesehatan belum menggambarkan kondisi Piutang yang sebenarnya secara utuh, dimana Piutang terhadap BPJS dicatat hanya pada saat tagihan jasa pelayanan kesehatan diakui/disetujui oleh BPJS, sementara untuk tagihan yang belum dan/atau tidak diakui oleh BPJS tidak dicatat dan tidak dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau, padahal biaya-biaya atas jasa pelayanan tersebut sudah dibebankan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Hal ini belum sesuai dengan prinsip *matching cost againts revenue*, yaitu suatu prinsip yang menekankan perlunya menghubungkan beban biaya dengan pendapatan yang diakui pada periode yang sama.

Pada tahun 2025 jumlah klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diajukan kepada BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

1.	Klaim BPJS yang diajukan		120.404.002.000,00
2.	Klaim BPJS yang disetujui		100.256.501.514,00
3.	Klaim BPJS yang belum disetujui (pending)	(1 - 2)	20.147.500.486,00
4.	Klaim BPJS yang tidak disetujui (ditolak)		433.431.800,00
5.	Pemotongan tagihan		836.759.204,00
6.	Sisa Klaim BPJS yang belum disetujui (pending)	(3 - 4 - 5)	**18.877.309.482,00**

Kondisi ini mengakibatkan RSUD Raja Ahmad Tabib selama tahun 2025 kehilangan pendapatan yang berasal dari klaim BPJS Kesehatan yang ditolak dan pemotongan tagihan sebesar total Rp1.270.191.004,00, dan berpotensi kehilangan pendapatan sebesar Rp18.877.309.482,00.

3.1.1.3. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka diakui ketika hak untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp55.742.777,78, dan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

3.1.1.4. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.339.483.667,51 terdiri dari:

- Persediaan APBD	: Rp	827.977.669,55
- Persediaan BLUD	:	Rp 16.511.505.997,96
Jumlah	:	**Rp 17.339.483.667,51**

Rincian mutasi Persediaan APBD tahun 2024 dan 2025 terdiri atas:

Tabel 5.14

Mutasi Persediaan APBD Tahun 2025

NO.	URAIAN	STOK OPNAME 2024	PENERIMAAN 2025	PENGELUARAN 2025	STOK OPNAME 2025
	Belanja Bahan	**0,00**	**2.768.013.000,00**	**2.768.013.000,00**	**0,00**
1	Bahan Kimia	0,00	454.440.000,00	454.440.000,00	0,00
2	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bahan Baku	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	2.313.573.000,00	0,00
5	Bahan Lainnya	0,00	2.313.573.000,00	0,00	0,00
	Belanja Suku Cadang	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
NO.	**URAIAN**	**STOK OPNAME 2024**	**PENERIMAAN 2025**	**PENGELUARAN 2025**	**STOK OPNAME 2025**
6	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja untuk Keg Kantor	**26.067.664,00**	**151.660.922,00**	**149.462.430,00**	**2.198.492,00**
8	Alat Tulis Kantor	18.650.664,00	21.550.664,00	19.352.172,00	2.198.492,00
9	Kertas dan Cover	0,00	41.531.995,00	41.531.995,00	0,00
10	Bahan Cetak	3.355.000,00	21.306.895,00	21.306.895,00	0,00
11	Benda Pos	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
12	Bahan Komputer	0,00	61.249.368,00	61.249.368,00	0,00
13	Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Alat Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kegiatan Kantor Lainnya	4.062.000,00	4.062.000,00	4.062.000,00	0,00
	Belanja Obat-obatan	**0,00**	**1.141.337.409,00**	**315.558.231,45**	**825.779.177,55**
16	Obat	0,00	1.141.337.409,00	315.558.231,45	825.779.177,55
	Belanja Natura dan Pakan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Persediaan APBD		**26.067.664,00**	**4.061.011.331,00**	**3.233.033.661,45**	**827.977.669,55**

Rincian mutasi Persediaan BLUD tahun 2024 dan 2025 terdiri atas:

Tabel 5.15

Mutasi Persediaan BLUD Tahun 2025

NO.	URAIAN	STOK OPNAME 2024	PENERIMAAN 2025	PENGELUARAN 2025	STOK OPNAME 2025
	Belanja Bahan	**6.079.476.347,05**	**45.398.349.469,05**	**36.558.012.270,89**	**8.840.337.198,16**
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	77.885.290,00	77.885.290,00	0,00
2	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	24.837.360,00	24.837.360,00	0,00
3	Bahan Lainnya	6.079.476.347,05	45.295.626.819,05	36.455.289.620,89	8.840.337.198,16
	Belanja Suku Cadang	**0,00**	**229.794.095,00**	**229.794.095,00**	**0,00**
4	Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	229.794.095,00	229.794.095,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	**44.302.900,00**	**1.231.461.195,00**	**1.195.700.524,00**	**35.760.671,00**
5	Alat Tulis Kantor	43.403.900,00	131.816.359,00	120.220.388,00	11.595.971,00
6	Kertas dan Cover	0,00	245.346.473,00	221.181.773,00	24.164.700,00
7	Bahan Cetak	899.000,00	270.548.604,00	270.548.604,00	0,00
8	Benda Pos	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
9	Bahan Komputer	0,00	103.261.182,00	103.261.182,00	0,00
10	Perabot Kantor	0,00	192.379.252,00	192.379.252,00	0,00
11	Suvenir/Cendera Mata	0,00	31.127.070,00	31.127.070,00	0,00
12	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	238.982.255,00	238.982.255,00	0,00
	Belanja Obat-obatan	**6.737.800.452,15**	**30.939.603.000,15**	**23.304.194.871,35**	**7.635.408.128,80**
13	Obat	6.737.800.452,15	30.939.603.000,15	23.304.194.871,35	7.635.408.128,80
14	Obat-obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Persediaan BLUD		**12.861.579.699,20**	**77.799.207.759,20**	**61.287.701.761,24**	**16.511.505.997,96**

Metode pencatatan persediaan barang, seperti obat-obatan di Bagian Akuntansi RSUD RAT masih menggunakan metode periodik, belum menerapkan metode perpetual, artinya pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir periode dengan melakukan stock opname terhadap barang-barang yang ada di gudang dan mencocokkan dengan kartu stocknya, sementara pada saat barang diterima Bagian Akuntansi tidak mencatat sebagai penerimaan persediaan barang, dan pada saat barang

digunakan/dikeluarkan tidak dicatat sebagai beban pemakaian barang persediaan. Hal ini belum sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2022 yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024, pada Bab XIII angka 19 yang menyebutkan:

- Huruf a): Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (stock opname). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik, maka diunggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (stock opname). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Huruf b): Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Kondisi ini dapat mengakibatkan lemahnya sistem pengendalian intern terhadap persediaan barang karena dengan menggunakan metode periodik, persediaan barang yang seharusnya ada tidak dapat diketahui secara langsung dari sistem akuntansi yang ada.

3.1.2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Rincian Aset Tetap RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.16

Aset Tetap

NO.	ASET TETAP	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	376.835.328.830,53	331.051.512.639,53	45.783.816.191,00
3	Gedung dan Bangunan	272.603.365.212,56	270.696.151.212,56	1.907.214.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.279.215.917,36	12.279.215.917,36	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	640.455.426,00	640.455.426,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	923.202.500,00	923.202.500,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(380.512.353.606,60)	(309.317.565.946,97)	71.194.787.659,63
	Jumlah Aset Tetap	**282.769.214.279,85**	**306.272.971.748,48**	(23.503.757.468,63)

3.1.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap Tanah RSUD Raja Ahmad Tabib per 31 Desember 2025 nihil karena Aset Tetap Tanah RSUD Raja Ahmad Tabib belum diserahkan dan masih tercatat sebagai Aset Tetap di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk menjaga prinsip akuntabilitas sebaiknya aset-aset yang dikuasai dan dikelola oleh RSUD Raja Ahmad Tabib diserahkan pencatatan dan pengelolaannya kepada RSUD Raja Ahmad Tabib.

3.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp376.835.328.830,53 meningkat sebesar Rp45.783.816.191,00 dibandingkan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp Rp331.051.512.639,53.

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.17

Aset Tetap Peralatan dan Mesin

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	Alat Besar	288.884.240,00	288.884.240,00	0,00
2	Alat Angkutan	5.879.857.479,67	5.879.857.479,67	0,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.690.003.810,00	4.690.003.810,00	0,00
4	Alat Pertanian	78.270.840,00	78.270.840,00	0,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	30.922.764.822,94	26.172.343.216,94	4.750.421.606,00
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8.835.359.439,08	8.793.811.002,08	41.548.437,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	263.782.686.093,90	228.505.624.361,90	35.277.061.732,00
8	Alat Laboratorium	39.646.081.504,34	34.660.706.818,34	4.985.374.686,00
9	Alat Persenjataan	7.208.775.767,00	6.908.777.167,00	299.998.600,00
10	Komputer	13.716.527.456,60	13.287.116.326,60	429.411.130,00
11	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
12	Alat Keselamatan Kerja	263.135.500,00	263.135.500,00	0,00
13	Peralatan Proses/Produksi	1.487.981.877,00	1.487.981.877,00	0,00
	Jumlah Peralatan dan Mesin	**376.835.328.830,53**	**331.051.512.639,53**	**45.783.816.191,00**

3.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan RSUD Raja Ahmad Tabib per 31 Desember 2025 sebesar Rp272.603.365.212,56, meningkat sebesar

Rp1.907.214.000,00 dibandingkan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp270.696.151.212,56.

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.18

Aset Tetap Gedung dan Bangunan

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	266.177.416.612,56	264.270.202.612,56	1.907.214.000,00
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	6.425.948.600,00	6.425.948.600,00	0,00
	Jumlah Gedung dan Bangunan	**272.603.365.212,56**	**270.696.151.212,56**	**1.907.214.000,00**

3.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan RSUD Raja Ahmad Tabib per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.279.215.917,36 tidak ada perubahan dibandingkan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp12.279.215.917,36.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.19

Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	Jalan	2.437.183.579,70	2.437.183.579,70	0,00
2	Bangunan Air Irigasi	163.637.100,00	163.637.100,00	0,00
3	Bangunan Pengairan Pasang Surut	3.668.324.430,00	3.668.324.430,00	0,00
4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	206.145.335,00	206.145.335,00	0,00
5	Bangunan Air Bersih/Air Baku	48.375.850,00	48.375.850,00	0,00
6	Bangunan Air Kotor	128.759.600,00	128.759.600,00	0,00
7	Instalasi Air Bersih/Air Baku	138.765.400,00	138.765.400,00	0,00

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
8	Instalasi Pembangkit Listrik	1.255.708.922,66	1.255.708.922,66	0,00
9	Instalasi Gardu Listrik	4.156.473.500,00	4.156.473.500,00	0,00
10	Jaringan Listrik	75.842.200,00	75.842.200,00	0,00
	Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan	**12.279.215.917,36**	**12.279.215.917,36**	**0,00**

3.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya RSUD Raja Ahmad Tabib per 31 Desember 2025 sebesar Rp640.455.426,00 tidak ada perubahan jika dibandingkan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp640.455.426,00.

Rincian Aset Tetap Lainnya tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.20

Aset Tetap Lainnya

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	99.576.326,00	99.576.326,00	0,00
2	Barang Bercorak Kesenian	295.229.100,00	295.229.100,00	0,00
3	Alat Bercorak Kebudayaan	49.170.000,00	49.170.000,00	0,00
4	Tanaman	196.480.000,00	196.480.000,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap Lainnya	**640.455.426,00**	**640.455.426,00**	**0,00**

3.1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan RSUD Raja Ahmad Tabib per 31 Desember 2025 berupa lanjutan pengerjaan konstruksi bangunan yang belum selesai di tahun 2024 sebesar Rp923.202.500,00. Hal ini menunjukkan tidak ada nya perubahan nilai di tahun 2025 disebabkan pengerjaannya belum selesai pada tahun 2024 dan 2025.

Rincian Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.21

Konstruksi Dalam Pengerjaan

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	Review Tata Ruang Lingkungan (Outdoors) Rumah Sakit	823.515.000,00	823.515.000,00	0,00
2	Pembangunan Gerbang dan Plank Nama Masjid	0,00	0,00	0,00
3	Pekerjaan Taman dan Penghijauan Area Masjid	0,00	0,00	0,00
4	Fasilitas Kesehatan Lainnya - Jasa Konsultasi Perencanaan DED Gedung Isolasi	99.687.500,00	99.687.500,00	0,00
5	Pembangunan Bunker Radiologi	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**923.202.500,00**	**923.202.500,00**	0,00

3.1.2.7 Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar minus Rp380.512.353.606,60 meningkat sebesar Rp71.194.787.659,63 dibandingkan dengan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar minus Rp309.317.565.946,97.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dalam Pengerjaan tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.22

Akumulasi Penyusutan

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(226.341.806,00)	(226.341.806,00)	0,00
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(104.663.638.850,70)	(39.632.241.339,01)	65.031.397.511,69
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(1.855.683.791,00)	(1.855.683.791,00)	0,00

4	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(59.070.239,00)	(59.070.239,00)	0,00
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(19.219.459.470,54)	(19.219.459.470,54)	0,00
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(6.842.074.581,00)	(6.842.074.581,00)	0,00
7	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(142.921.135.971,00)	(142.921.135.971,00)	0,00
8	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(21.467.205.553,34)	(21.467.205.553,34)	0,00
9	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(2.993.249.464,00)	(2.993.249.464,00)	0,00
10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(9.940.890.931,60)	(9.940.890.931,60)	0,00
11	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(228.987.948,00)	(228.987.948,00)	0,00
12	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	(55.116.812,00)	(55.116.812,00)	0,00
13	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(64.468.758.877,91)	(58.634.664.573,55)	5.834.094.304,36
14	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(2.000.495.961,93)	(2.000.495.961,93)	0,00
15	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(1.409.268.965,00)	(1.409.268.965,00)	0,00
16	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(1.810.707.921,00)	(1.810.707.921,00)	0,00
17	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(350.266.462,58)	(20.970.619,00)	329.295.843,58
	Jumlah	**(380.512.353.606,60)**	**(309.317.565.946,97)**	**71.194.787.659,63**

3.1.3. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya RSUD Raja Ahmad Tabib per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.771.275.000,06 menurun sebesar Rp10.675.000 jika dibandingkan nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp5.781.950.000,06.

Rincian Aset Lainnya tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.23

Aset Lainnya

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	Aset Tidak Berwujud	5.819.275.000,06	5.819.275.000,06	0,00
2	Aset Lain-lain	17.561.084.497,00	17.571.759.497,00	(10.675.000)
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(48.000.000,00)	(48.000.000,00)	0,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(17.561.084.497,00)	(17.561.084.497,00)	0,00
	Jumlah	**5.771.275.000,06**	**5.781.950.000,06**	**10.675.000**

3.2. Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Rincian Kewajiban RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.24

Kewajiban Jangka Pendek

NO.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	25.091.881,00	(25.091.881,00)
2	Utang Belanja Pegawai BLUD	943.177.607,00	0,00	943.177.607,00
3	Utang Belanja Barang	3.389.087.409,00	0,00	3.389.087.409,00
4	Utang Belanja Jasa	0,00	975.754.394,00	(975.754.394,00)
5	Utang Belanja Pemeliharaan	191.645.940,00	0,00	191.645.940,00
6	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.344.196.881,00	29.204.253.778,00	139.943.103,00
7	Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00
8	Utang Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	176.298.000,00	176.298.000,00
9	Utang Belanja Modal Komputer	55.611.000,00	143.894.000,00	(88.283.000,00)
10	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	195.360.000,00	0,00	195.360.000,00
	Jumlah	**34.119.078.837,00**	**30.547.292.053,00**	**3.571.786.784,00**

Berdasarkan tabel 5.24 Kewajiban Jangka Pendek pada RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2025 sebesar Rp34.119.078.837,00 yang terdiri dari :

1. Utang belanja yang bersumber dari APBD tahun 2025 sebesar Rp3.831.704.349,00 yang terdiri dari :
   a. Utang Belanja Barang sebesar Rp3.389.087.409,00;
   b. Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp191.645.940,00;
   c. Utang Belanja Modal Komputer sebesar Rp55.611.000,00;
   d. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp195.360.000,00.

2. Utang Belanja yang bersumber dari RBA BLUD terdiri dari :
   a. Utang Belanja Pegawai (Utang Jasa Pelayanan ASN Tahun 2025 berupa JP BPJS Kesehatan Susulan Bulan Desember Tahun 2025, JP Umum Bulan Desember 2025, JP Jaminan Lainnya Bulan Desember 2025, JP JKN Parsial Bulan Desember 2025, Jasa Dodiknis Bulan November 2025 dan Jasa Perseptor Klinik/CI Bulan November 2025, sebesar Rp943.177.607,00
   b. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp29.344.296.881,00 yang terdiri dari :
      1. Utang Belanja Jasa Pelayanan Tahun 2024 sebesar Rp15.993.531.798,00
      2. Utang Belanja Barang Medis Habis Pakai (BMHP) dan Obat-Obatan Tahun 2025 sebesar Rp12.987.707.450,00
      3. Utang Belanja Jasa Pelayanan Non ASN Tahun 2025 dan Premi iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp362.957.633,00

         Utang Belanja Jasa Pelayanan Tahun 2024 sebesar Rp15.993.531.798,00 belum direalisasikan pada Tahun 2025 dikarenakan penganggaran atas utang jasa pelayanan tersebut belum dimasukkan di dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2025 dan baru di anggarkan pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2026

3.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau. Ekuitas RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp274.159.644.344,94, menurun sebesar Rp29.031.432.018,05 dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp303.191.076.362,99.

Rincian Ekuitas RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.25

Ekuitas

NO.	EKUITAS	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	Ekuitas Dana	269.600.283.315,99	338.267.579.769,44	(68.667.296.453,45)
2	Surplus/Defisit - LO	(113.749.325.507,05)	(154.280.428.744,22)	(40.531.103.237,17)
3	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	118.308.686.536,00	119.203.925.337,77	(895.238.801,77)
	Jumlah Ekuitas	**274.159.644.344,94**	**303.191.076.362,99**	(29.031.432.018,05)

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan - LO;
b. Belanja;
c. Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
d. Kegiatan non operasional;
e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
f. Pos Luar Biasa; dan
g. Surplus/Defisit-LO.

4.1. Pendapatan - LO

Pendapatan - LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan - LO RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar Rp175.430.697.167,57, dan tahun 2024 sebesar Rp123.232.938.975,69, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.26

Pendapatan – LO

NO.	URAIAN	2025	2024	KENAIKAN / PENURUNAN
1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO**	**138.025.996.069,57**	**123.232.938.975,69**	**14.793.057.093,88**
1.1.	Retribusi Jasa Umum - LO	136.664.645.240,00	122.191.429.381,30	14.473.215.858,70
1.2.	Retribusi Jasa Usaha - LO	258.182.192,00	135.542.000,00	122.640.192,00
1.3.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.480.970,00	0,00	1.480.970,00
1.4	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	341.518,00	0,00	341.518,00
1.5	Pendapatan dari Pengembalian - LO	98.544.952,05	35.592.600,00	62.952.352,05
1.6	Pendapatan dari BLUD - LO	1.002.801.197,52	870.374.994,39	132.426.203,13
2.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO**	**37.404.701.098,00**	**0,00**	**37.404.701.098,00**
2.1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	37.404.701.098,00	0,00	37.404.701.098,00
	JUMLAH PENDAPATAN - LO	**175.430.697.167,57**	**123.232.938.975,69**	**52.197.758.191,88**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp144.774.215.484,57, sedangkan Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional (LO) sebesar Rp138.025.996.069,57, sehingga terdapat selisih sebesar Rp6.748.219.415,00 yang dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.27

Selisih Pendapatan – LRA & LO

URAIAN PENDAPATAN	JUMLAH PENDAPATAN - LRA	PELUNASAN PIUTANG TAHUN SEBELUMNYA	PENETAPAN PIUTANG TAHUN BERJALAN	PELUNASAN PIUTANG TAHUN BERJALAN	JUMLAH PENDAPATAN - LO
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**144.774.215.484,57**				**138.025.996.069,57**
Retribusi Daerah	**143.676.589.791,00**				**136.922.827.432,00**
Retribusi Jasa Umum	**143.460.268.991,00**				**136.664.645.240,00**
Retribusi Pelayanan Kesehatan	143.460.268.991,00	(8.217.989.325,00)	127.239.155.121,00	(125.836.789.547,00)	136.664.645.240,00
Retribusi Jasa Usaha	**196.320.800,00**				**258.182.192,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	187.170.800,00	(23.754.000,00)	236.232.192,00	(150.616.800,00)	249.032.192,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	9.150.000,00				9.150.000,00

Lain-lain PAD yang Sah	**1.097.625.693,57**				**1.103.168.637,57**
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	**1.480.970,00**				**1.480.970,00**
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.480.970,00				1.480.970,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	**341.518,00**				**341.518,00**
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	341.518,00				341.518,00
Pendapatan dari Pengembalian	**98.544.952,05**				**98.544.952,05**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	98.544.952,05				98.544.952,05
Pendapatan BLUD	**997.258.253,52**				**1.002.801.197,52**
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	861.645.442,00		361.588.386,00	(356.045.442,00)	867.188.386,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	135.612.811,52				135.612.811,52

4.2. Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban pada BLU diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan/atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, dan Beban Penyisihan Piutang dengan realisasi tahun

2025 sebesar Rp 253.328.740.347,62, dan tahun 2024 sebesar Rp239.878.988.620,18, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.28

Beban Operasi – LO

NO.	URAIAN	2025	2024	KENAIKAN / PENURUNAN
1	**Beban Pegawai**	**128.224.709.398,00**	**98.479.478.307,00**	**29.745.231.091,00**
1.1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	34.682.235.168,00	24.474.760.310,00	10.207.474.858,00
1.2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	59.155.641.555,00	56.734.290.916,00	2.421.350.639,00
1.3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	916.030.000,00	(916.030.000,00)
1.4.	Beban Pegawai BLUD	34.386.832.675,00	16.354.397.081,00	18.032.435.594,00
2	**Beban Barang dan Jasa**	**125.026.549.777,40**	**140.954.589.182,53**	**(15.930.446.000,13)**
2.1.	Beban Barang	3.399.197.615,45	843.104.651,00	2.556.092.964,45
2.2.	Beban Jasa	13.171.008.229,00	26.638.000.765,33	(13.466.992.536,33)
2.3.	Beban Pemeliharaan	1.662.323.090,00	76.951.020,00	1.585.372.070,00
2.4.	Beban Perjalanan Dinas	37.320.578,00	92.932.758,00	(55.612.180,00)
2.5.	Beban Barang dan Jasa BLUD	106.756.700.264,95	113.303.599.988,20	(6.546.899.723,25)
3	**Beban Penyisihan Piutang**	**77.481.172,22**	**444.921.130,65**	**(367.439.958,43)**
3.1.	Beban Penyisihan Piutang	77.481.172,22	444.921.130,65	(367.439.958,43)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	**253.328.740.347,62**	**239.878.988.620,18**	**13.449.751.727,44**

Realisasi Belanja Operasi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp253.868.136.957,93, sedangkan Beban Operasi pada Laporan Operasional (LO) sebesar Rp253.328.740.347,62, sehingga terdapat selisih sebesar Rp539.396.610,31 yang dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.29

Selisih Belanja Operasi LRA & Beban Operasi LO

BELANJA OPERASI	253.868.136.957,93										253.328.740.347,62
Belanja Pegawai	127.369.623.871,00										124.224.799.268,00
Belanja Hibah dan Tunjangan DPR	36.751.337.000,00										36.751.337.000,00
Belanja Dep Presiden RDH	23.322.337.286,00										23.322.337.286,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH	1.384.242.720,00										1.384.242.720,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH	775.515.000,00										775.515.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional KDH	2.812.567.200,00										2.812.567.200,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum KDH	330.955.200,00										330.955.200,00
Belanja Tunjangan Beras KDH	1.410.954.000,00										1.410.954.000,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH	17.509.185,00										17.509.185,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH	416.000,00										416.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH	2.389.889.040,00	(30.051.681,00)									2.359.889.712,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH	95.195.521,00										95.195.521,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH	190.319.083,00										190.319.083,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	56.133.891.100,00										56.133.891.100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	20.304.299.000,00										20.304.299.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.811.152.725,00										3.811.152.725,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkan Profesi ASN	7.741.126.360,00										7.741.126.360,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	22.095.113.431,00										22.095.113.431,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif - Jamsostek ASN	-										-
Belanja Honorarium	-										-
Belanja Pegawai BLUD	53.643.811.648,00										48.896.933.675,00
Belanja Pegawai BLUD	33.641.805.656,00		641.177.607,00								34.282.983.263,00
Belanja Barang dan Jasa	158.940.919.286,00										125.191.533.304,93
Belanja Barang	192.582.725,00										2.386.772.021,48
Belanja Barang Pihak Ketiga	441.856.200,00		1.193.997.903,00	(5.997.644,48)	(671.777.649,52)						1.223.033.921,48
Belanja Non Tetap yang Telah Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	-								100.740.000,00		100.740.000,00
Belanja Jasa	54.148.763.553,00										52.571.899.033,00
Belanja Jasa Kantor	13.287.375.971,00	(215.784.384,00)									12.791.463.511,00
Belanja Jasa Jaminan Asuransi	280.864.442,00										252.904.258,00
Belanja Jasa Perbaikan dan Servis	-										-
Belanja Jasa Pemasangan dan Instalasi	36.741.112,00										36.741.112,00
Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbingan Teknis/Asistensi/Advokasi	-										-
Belanja Pemeliharaan	1.479.613.154,00										1.382.313.690,28
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.477.064.150,00										1.477.064.150,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	650.611.060,00		741.665.943,00								595.278.958,00
Belanja Perjalanan Dinas	31.333.135,00										31.333.073,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.333.073,00										31.333.073,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	119.249.866.625,00										105.764.714.963,75
Belanja Barang dan Jasa BLUD	118.260.866.615,00	(15.210.121.860,00)	11.943.678.150,00	(1.081.119.999,00)	(16.311.585.667,48)	55.743.777,75			(45.782.958,00)		105.764.714.963,75
Belanja Pengolahan Pakang	-										79.389.016,00
Belanja Penyaluran Pakang Kepada Desa	-									17.643.647,00	17.643.647,00
Belanja Penyaluran Pakang Lainnya (Kel yang lain)	-									-	97.745,75

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan keuangan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi periode 1 Januari sampai 31 Desember 2025 adalag sebesar Rp9.225.440.062,64 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp2.086.739.917,01.

Tabel 5.30

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

NO.	URAIAN	2025	2024
1	Arus Kas Masuk	263.093.577.020,57	235.316.966.318,01
2	Arus Kas Keluar	253.868.136.957,93	233.230.226.401,00
	Jumlah	**9.225.440.062,64**	**2.086.739.917,01**

Arus Kas masuk dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari sampai 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp263.093.577.020,57 dan untuk periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp235.316.966.318,01, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

NO.	URAIAN	2025	2024
1	Pendapatan dari APBD	118.319.361.536,00	119.248.318.550,32
2	Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat	144.774.215.484,57	116.068.647.767,69
	Jumlah	**263.093.577.020,57**	**235.316.966.318,01**

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari sampai 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp253.868.136.957,93 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp233.230.266.401,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.32

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

NO.	URAIAN	2025	2024
1	Belanja Pegawai APBD	127.306.623.672,00	98.546.369.902,00
2	Belanja Barang dan Jasa APBD	126.561.513.285,93	134.683.856.499,00
	Jumlah	**253.868.136.957,93**	**233.230.226.401,00**

5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan periode 1 Januari sampai 31 Desember 2025 dan 2024 adalah nihil. Sementara Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan periode 1 Januari sampai 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.781.904.053,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 adalah sebesar Rp18.606.362.212,32.

Tabel 5.33

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

NO.	URAIAN	2025	2024
1	Arus Kas Masuk	0,00	0,00
2	Arus Kas Keluar	8.781.904.053,00	18.606.362.212,32
	Selisih	**(8.781.904.053,00)**	**(18.606.362.212,32)**

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan periode 1 Januari sampai 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.781.904.053,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 adalah sebesar Rp18.606.362.212,32.

Tabel 5.34

Rincian Arus Kas Keluar

NO.	URAIAN	2025	2024
1	Perolehan Tanah	0,00	0,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	8.781.904.053	6.687.428.829.00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	0,00	7.799.433.383.32
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6	Perolehan Aset Lainnya	0,00	4.119.500.000.00
7	Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00
8	Pengeluaran Investasi Non Permanen	0,00	0,00
	Jumlah	**8.781.904.053**	**18.606.362.212,32**

5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan dan Pembiayaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan dan Pembiayaan periode 1 Januari sampai 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00, dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp0,00.

Tabel 5.35

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan dan Pembiayaan

NO.	URAIAN	2025	2024
1	Arus Kas Masuk	0,00	0,00
2	Arus Kas Keluar	0,00	0,00
	Selisih	**0.00**	**0.00**

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dan Pembiayaan periode 1 Januari sampai 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 juga sama sebesar Rp0,00.

Tabel 5.36

Rincian Arus Kas Keluar

NO.	URAIAN	2025	2024
1	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00
2	Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain	0,00	0,00
3	Penyetoran Ke Kas Daerah	0.00	0.00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**

5.4. Saldo Akhir Kas di BLUD

Saldo Akhir Kas di BLUD per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp665.991.783,57, dan tahun 2024 sebesar Rp222.455.773,93, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.37

Saldo Akhir Kas di BLUD

NO.	URAIAN	2025	2024
1	Saldo Awal Kas di BLUD	222.455.773,93	16.742.078.069,24
2	**Saldo Akhir Kas di BLUD**	**665.991.783,57**	**222.455.773,93**

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban RSUD Raja Ahmad Tabib pada waktu tertentu. Laporan perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

1. Ekuitas Awal
2. Koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang antara lain yang berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan dasar seperti :
   a. Koreksi kesalahan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya
   b. Perubahan nilai aset tetap karena evaluasi aset tetap
   c. Koreksi ekuitas lainnya
3. Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan
4. Ekuitas akhir

Ekuitas Awal

Pada Tahun 2025 RSUD Raja Ahmad Tabib mencatat ekuitas awal sebesar Rp303.191.076.362,99 dan ekuitas awal Tahun 2024 sebesar Rp338.607.432.487,55.

Koreksi saldo ekuitas awal

Koreksi saldo ekuitas awal merupakan koreksi lain-lain sebesar (Rp33.590.793.047,00) yang terdiri atas :

1. Koreksi tambah atas mutasi aset gedung dan bangunan sebesar Rp1.711.854.000,00
2. Koreksi tambah atas saldo penyisihan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD RAT sebesar Rp41.092.065,63
3. Koreksi tambah penyisihan piutang retribusi jasa usaha pemakaian ruangan karena pelunasan sebesar Rp190.020,00
4. Koreksi kurang saldo awal piutang retribusi pelayanan kesehatan di RSUD RAT sebesar (Rp423.800,00)
5. Koreksi kurang akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan dari Dinas Kesehatan sebesar (Rp379.460.970,00)
6. Koreksi kurang atas mutasi akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin yang merupakan hibah aset tetap dari Kemenkes sebesar (Rp34.964.044.362,63)

Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan dalam Laporan Operasional Tahun 2025 tercatat defisit sebesar Rp113.749.325.507,05 sementara Tahun 2024 sebesar Rp154.280.428.744,22

Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah sebesar Rp274.159.644.344,94 dan Tahun 2024 sebesar Rp303.191.076.362,99.

Tabel 5.38

Ekuitas Akhir

NO.	URAIAN	2025	2024
1	Aset	308.278.723.181,94	333.738.368.415,99
2	Kewajiban	34.119.078.837,00	30.547.292.053,00
3	Ekuitas	274.159.644.344,94	303.191.076.362,99

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

RSUD Provinsi Kepulauan Riau digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2005 - 2010 (Ismeth Abdullah dan Muhammad Sani). Peletakan batu pertama dilaksanakan pada tahun 2007.

RSUD Provinsi Kepulauan Riau merupakan Rumah Sakit yang diarahkan untuk menjadi rumah sakit kelas B Pendidikan dan telah beroperasi sejak 29 Februari 2012 (*soft opening*) berdasarkan Surat Izin Operasional Rumah Sakit oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor 001/Dinkes/II/Tahun 2013. Adapun Direktur RSUD Provinsi Kepulauan Riau pertama kali adalah dr. Supartini selaku PLT. Direktur. Sesuai dengan Keputusan Gubernur No.988 Tahun 2014 RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang berubah nama menjadi RSUD Raja Ahmad Tabib.

B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Riau di bidang Pelayanan Kesehatan. RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau merupakan rumah sakit rujukan dari kabupaten/kota se- Provinsi Kepulauan Riau.

RSUD Raja Ahmad Tabib menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tanggal 1 Januari 2014 berdasarkan Peraturan Gubernur No.1A Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang.

BAB VII
PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dengan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Total belanja yang terealisasi pada RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar Rp262.650.041.010,93 atau 98,50% dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2025 sebesar Rp266.643.813.304,00.
2. Nilai aset yang dikuasai RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp308.278.723.181,94.
3. Nilai kewajiban yang masih ditanggung RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp34.119.078.837,00.
4. Nilai Ekuitas yang dimiliki RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp274.159.644.344,94.

Demikian Laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Mei 2026
Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib
Provinsi Kepulauan Riau

dr. Bambang Utoyo, M.A.P
NIP 198101292009041003

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD TANJUNG UBAN

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

(STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN)



2025

DAFTAR ISI

Halaman

Pernyataan Tanggung Jawab .....

Laporan Keuangan

Neraca.....
Laporan Operasional.....
Laporan Perubahan Ekuitas.....
Laporan Arus Kas .....
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih .....
Catatan Atas Laporan Keuangan.. .....

1. Pendahuluan

1.1 Letak Geografis RSJKO Engku Haji Daud..... 1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan. 9
1.3 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan. 10
1.4 Sistimatika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan. 11

2. Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Kebijakan Keuangan. 12

3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Entitas Pelaporan. 13
3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Pelaporan Keuangan... 14
3.3 Basis Pengakuan dan Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan... 15

4. Rincian Pos-pos Laporan Keuangan

4.1 Penjelasan Pos-pos Neraca 22
4.2 Penjelasan Pos-pos Operasional 33
4.3 Penjelasan Laporan Ekuitas... 40
4.4 Laporan Arus Kas..... 51
4.5 Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih..... 56

5. Penutup.. .....

Lampiran .....

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengguna Anggaran (PA) Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Daerah Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (a). Neraca, (b). Laporan Operasional, (c). Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Laporan Arus Kas, (e) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendaliaan intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan imformasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjung Uban, Mei 2026

Pengguna Anggaran

dr. Asep Guntur Sapari, MARS

NIP: 19770209200502 1 003

PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	25.500.000.000,00	20.702.896.472,00	80,43	22.488.943.003,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.500.000.000,00	20.702.896.472,00	80,43	22.488.943.003,00
4.1.02	Retribusi Daerah	25.500.000.000,00	20.564.995.451,00	80,65	22.488.943.003,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	25.500.000.000,00	20.564.995.451,00	80,65	22.488.943.003,00
4.1.02.01.21	Retribusi Pelayanan Kesehatan	25.500.000.000,00	20.564.995.451,00	80,65	22.488.943.003,00
4.1.02.01.21.0008	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	25.500.000.000,00	20.564.995.451,00	80,65	22.488.943.003,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	137.901.020,00	0,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0,00	137.901.020,00	0,00	0,00
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	0,00	81.608.220,00	0,00	0,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	0,00	81.608.220,00	0,00	0,00
4.1.04.16.05	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLU Yang Sah	0,00	56.292.800,00	0,00	0,00
4.1.04.16.05.0006	Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha	0,00	56.292.800,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	25.500.000.000,00	20.702.896.472,00	80,43	22.488.943.003,00
	JUMLAH PENDAPATAN	25.500.000.000,00	20.702.896.472,00	80,43	22.488.943.003,00
5	BELANJA DAERAH	146.827.935.928,00	140.443.888.779,00	95,65	91.682.868.407,00
5.1	BELANJA OPERASI	89.558.447.778,00	85.110.362.693,00	95,03	59.934.852.733,00
5.1.01	Belanja Pegawai	57.150.205.189,00	55.317.125.230,00	96,79	52.882.159.707,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	39.766.649.000,00	39.426.947.556,00	99,15	35.937.783.657,00
5.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	14.253.701.440,00	14.240.187.881,00	99,91	13.408.457.400,00
5.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	10.637.244.587,00	10.564.140.000,00	99,31	13.355.559.600,00
5.1.01.01.0003	Belanja Gaji Pokok PPPK	3.616.547.062,00	3.588.087.881,00	99,21	3.052.117.800,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.288.151.050,00	1.261.482.144,00	97,93	1.156.879.460,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.023.974.588,00	1.014.794.121,00	99,10	998.700.376,00
5.1.01.01.02.0003	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	282.977.462,00	246.778.023,00	87,21	98.174.996,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Istri/Istri ASN	257.830.000,00	244.280.000,00	94,74	247.530.300,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Istri/Istri PNS	257.830.000,00	244.280.000,00	94,74	247.530.300,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.279.740.893,00	1.243.530.893,00	97,17	1.214.689.300,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.084.695.000,00	1.061.265.000,00	97,84	1.018.305.300,00
5.1.01.01.04.0003	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	195.045.893,00	182.265.893,00	93,45	96.384.000,00
5.1.01.01.09	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	197.900.000,00	184.900.000,00	93,43	73.340.300,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	88.625.000,00	80.700.000,00	91,06	73.340.300,00
5.1.01.01.09.0003	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	109.305.000,00	104.200.000,00	95,30	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	809.080.000,00	804.972.663,00	99,49	655.690.160,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	616.544.480,00	609.868.823,00	98,92	605.860.720,00
5.1.01.01.06.0003	Belanja Tunjangan Beras PPPK	192.535.520,00	195.104.803,00	101,33	49.829.440,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.925.534,00	9.657.167,00	51,03	12.917.253,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.925.534,00	9.657.167,00	64,70	12.917.253,00
5.1.01.01.07.0003	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	258.132,00	238.034,00	92,21	183.320,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	177.917,00	106.091,00	59,64	184.889,00
5.1.01.01.08.0003	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	80.215,00	68.951,00	85,96	18.394,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.457.451.400,00	1.395.115.151,00	95,72	1.155.171.131,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.197.692.862,00	1.143.084.600,00	95,44	1.130.224.555,00
5.1.01.01.09.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	260.490.538,00	252.030.549,00	96,75	134.946.856,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	98.290.961,00	93.001.384,00	94,62	33.403.841,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	74.092.078,00	73.804.480,00	99,61	31.253.497,00
5.1.01.01.10.0003	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	19.205.578,00	9.396.881,00	48,93	2.189.344,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	194.871.171,00	93.003.553,00	94,90	80.368.752,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	68.180.362,00	65.415.549,00	95,95	63.700.756,00
5.1.01.01.11.0003	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	26.687.099,00	24.590.065,00	92,14	4.567.996,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan (tapera)	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan (tapera)	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0003	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan (tapera)	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	33.406.376.189,00	31.824.357.037,00	95,26	31.404.585.126,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	19.076.568.274,00	14.855.907.217,00	77,89	14.453.783.511,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	15.087.793.412,00	13.388.888.816,00	88,74	13.089.659.351,00
5.1.01.02.01.0003	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.981.855.862,00	1.466.708.401,00	74,00	1.364.123.160,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.161.236.942,00	3.112.808.180,00	98,47	2.062.758.156,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.997.866.258,00	1.969.737.809,00	98,59	1.918.588.876,00
5.1.01.02.03.0003	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	153.332.589,00	143.165.363,00	93,37	134.973.282,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.763.737.038,00	1.806.141.889,00	102,40	1.911.022.689,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.763.737.038,00	1.806.141.889,00	102,40	1.911.022.689,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	13.413.901.995,00	13.102.035.065,00	97,67	12.974.019.940,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	10.305.561.305,00	10.199.499.117,00	98,97	12.109.993.009,00
5.1.01.02.05.0003	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.116.630.679,00	1.111.905.948,00	99,58	921.376.931,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif La	0,00	0,00	0,00	681.988.300,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	569.988.300,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	577.228.300,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	5.000.000.000,00	4.373.410.365,00	87,46	4.834.434.726,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	5.000.000.000,00	4.373.410.365,00	87,46	4.834.434.726,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	5.000.000.000,00	4.373.410.365,00	87,46	4.834.434.726,00

5.3.00	Belanja Barang dan Jasa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.3.00.00.00	Belanja Barang	5.270.172.870,00	5.172.605.182,00	98,16	4.582.975.032,00
5.1.02.05.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.270.172.870,00	5.172.605.182,00	98,16	4.582.975.032,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Alat/Bahan Bahan Bangunan dan Konstruksi	37.479.000,00	37.500.000,00	99,48	175.500.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Alat/Bahan Kebersihan dan Perlengkapan	285.123.300,00	284.515.650,00	98,43	154.975.900,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	4.459.300,00	3.560.000,00	80,78	20.900.000,00
5.1.02.05.01.0013	Belanja Bahan Bacaan Untuk Perpustakaan Umum	0,00	0,00	0,00	504.920.000,00
5.1.02.05.01.0015	Belanja Bahan Untuk Keperluan Laboratorium	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.01.0016	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.000.000,00	43.529.000,00	96,73	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0017	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0018	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0019	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0020	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0021	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0033	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0037	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0038	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0039	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0040	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0041	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0042	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0043	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0044	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0045	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0046	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0047	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0048	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0049	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0050	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0051	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0052	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0053	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0054	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0055	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0056	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0057	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0058	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0059	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0060	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0061	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0062	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0063	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0064	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0065	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0066	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0067	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0068	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0069	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0070	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0071	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0072	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0073	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0074	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0075	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0076	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0077	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0078	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0079	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0080	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0081	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0082	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0083	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0084	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0085	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0086	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0087	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0088	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0089	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0090	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0091	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0092	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0093	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0094	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0095	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0096	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0097	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0098	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0099	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0100	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0101	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0102	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0103	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0104	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0105	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0106	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0107	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0108	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0109	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0110	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0111	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0112	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0113	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0114	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0115	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0116	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0117	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0118	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0119	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0120	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0121	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0122	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0123	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0124	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0125	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0126	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0127	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0128	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0129	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0130	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0131	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0132	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0133	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0134	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0135	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0136	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0137	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0138	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0139	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0140	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0141	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0142	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0143	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0144	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0145	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0146	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0147	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0148	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0149	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0150	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0151	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0152	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0153	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0154	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0155	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0156	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0157	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0158	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0159	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0160	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0161	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0162	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0163	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0164	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0165	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0166	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0167	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0168	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0169	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0170	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0171	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0172	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0173	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0174	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0175	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0176	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0177	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0178	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0179	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0180	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0181	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0182	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0183	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0184	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0185	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0186	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0187	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang Cetakan dan Penggandaan	51.446.000,00	50.396.000,00	97,96	35.486.000,00
5.1.02.05.01.0188	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.05.01.0189	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	9.934.800,00	3.380.600,00	95,63	8.480.000,00
5.1.02.05.01.0190	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.05.01.0191	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	45.500.000,00	43.529.000,00	95,68	90.000.000,00
5.1.02.05.01.0192	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Barang

5.2.02.27.01.0006	Belanja Modal Alat Kesehatan THT	0,00	0,00	0,00	126.615.900,00
5.2.02.27.01.0021	Belanja Modal Alat Kesehatan Lain	0,00	0,00	0,00	1.490.342.000,00
5.2.02.27.01.0029	Belanja Modal Alat Kesehatan Lainnya	1.388.312.100,00	1.382.300.000,00	99,57	0,00
5.2.02.30	Belanja Modal Komputer	298.998.200,00	296.972.800,00	99,32	867.973.000,00
5.2.02.30.01	Belanja Modal Komputer Unit	217.907.500,00	216.562.800,00	99,38	339.150.000,00
5.2.02.30.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	217.907.500,00	216.562.800,00	99,38	339.150.000,00
5.2.02.30.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	81.090.700,00	80.410.000,00	99,16	528.823.000,00
5.2.02.30.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	60.890.700,00	60.060.000,00	98,64	20.123.000,00
5.2.02.30.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	20.200.000,00	20.000.000,00	99,01	0,00
5.2.02.30.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	478.700.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Aset Produksi, Pengadaan, dan Pemeliharaan	1.585.000.000,00	1.585.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Sumur	1.585.000.000,00	1.585.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	1.585.000.000,00	1.585.000.000,00	100,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.895.980.000,00	11.981.640.000,00	80,45	173.920.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	14.895.980.000,00	11.981.640.000,00	80,45	173.920.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	14.895.980.000,00	11.981.640.000,00	80,45	173.920.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	14.895.980.000,00	11.981.640.000,00	80,45	0,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Rumah Sakit	0,00	0,00	0,00	173.920.000,00
5.2.04	Belanja Modal Mesin, Jaringan, dan Instalasi	6.166.680.300,00	6.163.040.000,00	99,94	0,00
5.2.04.09	Belanja Modal Instalasi	6.166.680.300,00	6.163.040.000,00	99,94	0,00
5.2.04.09.02	Belanja Modal Instalasi Lain	6.166.680.300,00	6.163.040.000,00	99,94	0,00
5.2.04.09.02.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	6.166.680.300,00	6.163.040.000,00	99,94	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.000.000.000,00	578.584.000,00	57,86	1.242.175.884,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.000.000.000,00	578.584.000,00	57,86	1.242.175.884,00
5.2.06.99.03	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.000.000.000,00	578.584.000,00	57,86	1.242.175.884,00
5.2.06.99.03.0001	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.000.000.000,00	578.584.000,00	57,86	1.242.175.884,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**57.471.387.960,00**	**54.033.117.800,00**	**95,63**	**4.247.980.194,00**
	JUMLAH BELANJA	**148.827.835.318,00**	**140.443.480.775,00**	**95,55**	**91.682.849.027,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**[125.127.835.318,00]**	**[119.648.580.503,00]**	**92,02**	**[69.193.986.604,00]**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**[125.127.835.318,00]**	**[119.648.580.503,00]**	**92,02**	**[69.193.986.604,00]**

Provinsi Sumatera Utara, Mei 2024

KEPALA RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT PROVINSI SUMATERA UTARA

dr. ASEP GUNTUR SEPTIANE, MARS

NIP. 19770209 200501 1009

RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPRI TG. UBAN

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	**637.554.251,48**	**2.814.593.499,48**
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	191.563.490,48	2.814.593.500,48
Sub Total		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	191.563.490,48	637.554.251,48
Sub Total		
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**191.563.493,48**	**637.554.251,48**

Tanjung Uban, Mei 2026

Pengguna Anggaran

dr. Asep Gentur Sapari, MARS

NIP. 197702092005021003

NERACA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Per 31 Desember 2024 dan 2025

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 **Urusan Wajib Kesehatan**

Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 **RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPRI TG. UBAN**

URAIAN	2024	2025
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	637.554.251,48	191.249.243,48
Kas Lainnya	0,00	314.250,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	639.938.888,56
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	333.469.753,00	139.720.397,00
Penyisihan Piutang	(28.915.423,77)	(27.980.945,49)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	4.862.262.092,36	3.311.049.219,46
JUMLAH ASET LANCAR	**5.804.370.673,07**	**4.254.291.053,01**
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Dana Bergulir	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	**0,00**	**0,00**
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**0,00**	**0,00**
ASET TETAP		
Tanah	2.000.000.000,00	2.540.274.100,00
Peralatan dan Mesin	116.463.863.670,00	132.632.965.470,00
Gedung dan Bangunan	46.978.521.960,00	87.659.415.574,28
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.722.035.500,00	12.913.098.500,00
Aset Tetap Lainnya	181.700.600,00	181.700.600,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	34.870.000,00	34.870.000,00
Akumulasi Penyusutan	(98.958.493.486,10)	(112.893.125.581,52)
JUMLAH ASET TETAP	**73.422.498.243,90**	**123.069.198.662,76**
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	1.462.280.900,00	1.462.280.900,00
Aset Lain-lain	25.266.671.981,89	24.897.106.381,89

Akumulasi Penyusutan Aset Lain	(14.044.474.579,00)	(13.699.580.979,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	**12.684.478.302,89**	**12.659.806.302,89**
JUMLAH ASET	**91.911.347.219,86**	**139.983.296.018,66**
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	314.250,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	9.752.511.326,00	7.808.260.424,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	536.550.000,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**10.289.061.326,00**	**7.808.574.674,00**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	**10.289.061.326,00**	**7.808.574.674,00**
EKUITAS		
EKUITAS	81.622.285.893,86	132.174.721.344,66
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**91.911.347.219,86**	**139.983.296.018,66**

Tanjung Uban, Mei 2026

PENGGUNA ANGGARAN

dr. Asep Guntur Sapari, MARS

NIP. 19770209200502 1 003

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1.02.02 RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPRI TG. UBAN

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
7	**PENDAPATAN - LO**	**22.324.013.184,84**	**22.928.057.183,00**	**(604.043.998,16)**	**(2,63)**
7.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO**	**20.674.050.980,84**	**22.725.462.351,00**	**(2.051.411.370,16)**	**(9,03)**
7.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	20.471.285.096,00	20.471.285.096,00	40.942.570.192,00	0,00
7.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain lain PAD Yang Sah - LO	202.765.884,84	22.725.462.351,00	(22.522.696.466,16)	(99,11)
7.2	**PENDAPATAN TRANSFER - LO**	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO**	**1.649.962.204,00**	**202.594.752,00**	1.447.367.452,00	714,42
7.3.1	Pendapatan Hibah - LO	1.649.962.204,00	202.594.752,00	1.447.367.452,00	714,42
7.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**BEBAN**	**96.285.947.724,69**	**100.338.635.193,16**	**(4.052.687.468,47)**	**-4,04**
8.1	**BEBAN OPERASI**	**96.285.947.724,69**	**100.338.635.193,16**	**(4.052.687.468,47)**	**-4,04**
8.1.1	Beban Pegawai	55.669.828.988,00	52.835.898.137,00	2.833.930.851,00	5,36
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	29.015.069.503,90	35.694.127.122,79	(6.679.057.618,89)	(18,71)
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	594.141,88	1.715.523,77	(1.121.381,89)	(65,37)
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	10.184.816.522,51	8.473.500.969,16	1.711.315.553,35	20,20
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.071.082.722,80	3.136.802.875,40	(2.065.720.152,60)	(65,85)
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	341.543.345,56	233.578.065,00	107.965.280,56	46,22
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	3.012.500,04	3.012.500,04	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**(73.961.934.539,85)**	**(77.410.578.090,16)**	**3.448.643.550,31**	**(4,46)**
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	418.865.600,00	0,00	418.865.600,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**(74.380.800.139,85)**	**(77.410.578.090,16)**	**3.867.509.150,31**	**(5,00)**
	POS LUAR BIASA				
8.4.1	Beban Tidak Terduga	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**(74.380.800.139,85)**	**(77.410.578.090,16)**	**3.867.509.150,31**	**(5,00)**

Tanjung Uban, Mei 2026

PENGGUNA ANGGARAN

dr. Asep Gantur Seperi, MARS

NIP. 197702052008012003

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2025 dan 2024

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Kesehatan

Unit Organisasi : RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU KAJI DAUD PROVINSI KEPRI TG. UBAN

(Lainnya Rupiah)

No	URAIAN	2025	2024
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	*Arus Kas Masuk*		
3	Pendapatan dari APBD	119.541.644.322,00	67.468.293.540,00
4	Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat	20.782.896.472,00	22.468.943.003,00
5	Pendapatan Jasa Layanan Dari Lainnya Atas Beban / Dalam Rangka Pelaporan	0,00	0,00
6	Pendapatan Hasil Kerjasama	0,00	0,00
7	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
8	Pendapatan Lain - lain BLUD	0,00	0,00
9	***Jumlah Arus Kas Masuk (1 s/d 8)***	**140.327.540.794,00**	**89.987.236.543,00**
10	*Arus Kas Keluar*		
11	Belanja Pegawai	55.672.115.260,00	52.882.159.707,00
12	Belanja Perjalanan	5.170.855.162,00	4.560.975.032,00
13	Belanja Jasa	8.003.642.241,00	8.834.231.321,00
14	Belanja Pemeliharaan	193.995.000,00	1.546.160.330,00
15	Belanja Pinjaman Dana	193.547.701,00	589.942.422,00
16	Belanja Barang dan jasa BLUD	16.326.207.115,00	18.521.381.631,00
17	***Jumlah Arus Kas Keluar (11 s/d 25)***	**85.610.362.979,00**	**86.934.850.213,00**
18	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (9 - 16)**	**54.717.177.815,00**	**3.052.386.330,00**
19			
20	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan**		
21	*Arus Kas Masuk*		
22	Penjualan Aset Tanah	0,00	0,00
23	Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
24	Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
25	Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
26	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
27	Penerimaan dari Divestasi	0,00	0,00
28	Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
29	***Jumlah Arus Kas Masuk (20 s/d 26)***	**0,00**	**0,00**
30	*Arus Kas Keluar*		
31	Pembelian Tanah	0,00	0,00
32	Pembelian Peralatan dan Mesin	15.240.855.800,00	3.301.923.560,00
33	Pembelian Bangunan dan Gedung	32.941.640.000,00	173.300.000,00
34	Pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.163.040.000,00	0,00
35	Pembelian Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
36	Pembelian Aset Lainnya	470.584.000,00	1.270.175.894,00
37	Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00
38	Pengeluaran Investasi Non Permanen	0,00	0,00
39	***Jumlah Arus Kas Keluar (29s/d 36)***	**54.833.117.800,00**	**4.747.999.394,00**
40			
41	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan (27-37)**	**(54.833.117.800,00)**	**(4.747.999.394,00)**
42			
43	**Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan dan Pembiayaan**		
44	*Arus Kas Masuk*		
45	Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00
46	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain	0,00	0,00
47	***Jumlah Arus Kas Masuk (41 s/d 42)***	**0,00**	**0,00**
48	*Arus Kas Keluar*		
49	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00
50	Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain	0,00	0,00
51	Penyetoran ke Kas Daerah	330.365.023,00	481.426.184,00
52	***Jumlah Arus Kas Keluar (45 s/d 47)***	**330.365.023,00**	**481.426.184,00**
53	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (43-48)**	**(330.365.023,00)**	**(481.426.184,00)**
54			
55	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran**		
56	*Arus Kas Masuk*		
57	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.909.230.734,00	1.170.215.902,89
58	***Jumlah Arus Kas Masuk (52)***	**6.909.230.734,00**	**1.170.215.902,89**
59	*Arus Kas Keluar*		
60	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.908.916.484,00	1.170.215.902,89
61	***Jumlah Arus Kas Keluar (55)***	**6.908.916.484,00**	**1.170.215.902,89**
62			
63	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (53-56)**	**314.250,00**	**0,00**
64			
65	**Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (25+48+61+72)**	**(485.990.758,00)**	**(2.177.039.248,00)**
66	**Saldo Awal Kas di BLUD**	637.554.251,48	2.814.593.499,48
67	**Saldo Akhir Kas di BLUD (63 + 64)**	**181.563.493,48**	**637.554.251,48**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Tanjung Uban, [illegible] 2026

Pengelola Anggaran

dr. Anna Santa Sauni, MARS

NIP. 19771009200502 1 003

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 **Kesehatan**

Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 **RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPRI TG. UBAN**

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	81.622.285.893,86	87.758.756.958,97
SURPLUS/DEFISIT-LO	(74.380.800.139,85)	(77.410.578.090,16)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	316.046.065,78
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	5.718.956.791,65	4.086.541.948,53
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	**119.214.279.299,00**	**66.871.519.010,74**
EKUITAS AKHIR	**132.174.721.344,66**	**81.622.285.893,86**

Tanjung Uban, Mei 2026

PENGGUNA ANGGARAN

dr. Asep Guntur Sapari, MARS

NIP. 19770209200502 1 003

Kas dan Setara Kas 191.563.493,48

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas Per 31 Desember 2025, yang terdiri dari:

- **Kas Bend Pengeluaran :**	0,00
- **Kas BLUD**	191.563.493,48
	191.563.493,48

RINCIAN FISIK KAS :

Kas Tunai

* Kas di Bendahara Penerimaan	1.445.939,00
* Kas di Bendahara BLUD	0,00
	1.445.939,00

Rekening Bank :

- Bank BSI No 7129090809	0,00
- Bank Riau No 1460200007	0,00
- Bank BSI No 7030374929 (BLUD)	0,00
- Bank Riau No 1460112345 (BLUD)	190.117.554,48
- Bank BSI No 7030374937 Penerimaan	0,00
- Bank Riau No 1460101234 Penerimaan	0,00
	190.117.554,48

Jumlah Saldo Rek Koran Bendahara Pengeluaran BLUD Sebesar Rp 190117554,48,
Terdapat Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Belum Diselorkan Sebesar Rp 314 250,

Piutang Retribusi Daerah **139.720.397,00**

Jumlah tersebut merupakan Saldo Piutang Per 31 Desember 2025, yang terdiri dari:

- PT INHEALTH	587.800,00
* TCM	5.520.000,00

- PP ALILA VILLA	843.900,00	
- PP CONDOTEL	6.285.100,00	
- HUTAMA KARYA	13.102.500,00	
- BINTAN LAGOON	7.153.500,00	
- PERTAMINA	33.244.446,00	
- TASPEN	360.721,00	
- AMODA	4.340.500,00	
- JASA RAHARJA	1.659.730,00	
- JAMKESDA PROVINSI	66.622.200,00	
	139.720.397,00	
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		**639.938.888,56**

Jumlah tersebut merupakan Pengembalian Ke Kasda Atas Temuan BPK/INSPEKTORAT/IRJEN Tahun 2025 Yang Disetor Di Tahun 2026, yang terdir dari:

- Pengembalian Temuan BPK RI atas Selisih Harga Kegiatan Pengadaan UPS 200 KVA di RSJKO EHD Tahun2025	18.550.000,00
- Pengembalian Temuan BPK RI atas Denda Keterlambatan Kegiatan Pengadaan UPS 200 KVA di RSJKO EHD Tahun2025	84.864.865,00
- Pengembalian Temuan BPK RI atas Kelebihan Ongkos Kirim Pada Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Mediocre HRV di RSJKO EHD Tahun 2025	4.000.000,00
- Pengembalian Temuan BPK RI atas Kelebihan Bayar Ongkos Kirim Pada Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Neurofeedback di RSJKO EHD Tahun 2025	13.009.000,00
- Pengembalian Temuan BPK RI atas Kelebihan Bayar Ongkos Kirim Pada Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan TMS di RSJKO EHD Tahun 2025	6.490.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor ATK PKT Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	1.437.500,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover KERTAS Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	1.280.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover KERTAS Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	15.810.618,00
- Pengembalian Temuan BPK RI Kekurangan Volume Atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung Kantor (Pembangunan RSJKD Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Lanjutan) pada Rumah sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Tahun 2025	492.201.633,56
- Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras bulan Agustus sd Oktober 2025 an SYARIFAH SYAHARIAWATI	367.950,00

-	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras bulan Agustus sd Oktober 2025 an RATNA SARI DEVI	367.950,00
-	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras bulan Januari sd Juni, THR, dan Gaji ke-13 Tahun 2025 an ENDANG SULISTYOWATI	1.162.592,00
-	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Suami Pegawai yang Bercerai Bulan Desember 2025 an Reni Damita	387.780,00
		639.938.888,56

Piutang diragukan tertagih tahun 2024 **(27.980.945,49)**

-	Piutang diragukan tertagih tahun 2024	(27.421.072,10)
-	Piutang diragukan tertagih tahun 2025	(559.873,39)
		(27.980.945,49)

Dengan Rincian Peyisihan Sisa PiutangTahun 2024 Penyisihan Piutang nya Adalah Sebagai Berikut:

-	PP ALILA VILLA	843,900,00
-	PP CONDOTEL	6.285.100,00
-	HUTAMA KARYA	13.102.500,00
-	BINTAN LAGOON	7.153.500,00
-	TASPEN	36.072,10
		27.421.072,10

Sedangkan Rincian Peyisihan Piutang Tahun 2025 Penyisihan Piutangnya Adalah Sebagai Berikut:

-	PT INHEALTH	2.039,00
-	TCM	27.600,00
-	PERTAMINA	166.222,24
-	AMODA	21.702,50
-	JASA RAHARJA	8.298,65
-	JAMKESDA PROVINSI	333.111,00
		559.873,39

Persediaan **3.311.049.219,46**

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2025, terdiri dari:

-	Pesedian Bahan - Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (Solar)	32.800.000,00
-	Persedian Bahan-Bahan Lainnya	0,00
-	Persedian Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.337.500,00
-	Persedian Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	67.946.377,00
-	Persedian Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	22.663.500,00
-	Persedian Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cenderamata	0,00

- Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00
- Persediaan Obat dan BHP Medis	1.681.097.300,96
- Persediaan Natura dan Pakan-Natura	2.492.927,03
- Persediaan Oksigen Liquid	26.880.000,00
- Persediaan Obat-Obatan Tunda Bayar	1.470.831.614,50
	3.311.049.219,46

Aktiva Tetap..... **235.962.324.244,28**

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025, yang terdiri dari:

- Tanah	2.540.274.100,00
- Gedung dan Bangunan	87.659.415.574,28
- Peralatan & Mesin	132.632.965.470,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.913.098.300,00
- Aset Tetap Lainnya	161.700.600,00
- Kontruksi dalam Pengerjaan	34.870.000,00
	235.962.324.244,28

Jumlah nilai aset tetap yang berasal dari belanja modal tahun 2025 , Aset yang jumlah belanjanya:

- **Tanah**	0,00
- Gedung dan Bangunan	32.941.640.000,00
- Peralatan & Mesin	15.248.853.800,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
- Aset Tetap Lainnya	6.163.040.000,00
- Kontruksi dalam Pengerjaan	0,00
- Aset Lain-lain	479.584.000,00
	54.833.117.800,00

Jumlah nilai aset tetap yang berasal dari Hibah (Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja) tahun 2022 , Dan Mutasi Dari Dinkes Kepulauan Riau Tahun 2025, Aset yang jumlah belanjanya:

- Penerimaan Hibah Tanah seluas 7,5 Ha dari PT Satya Bangun Pertiwi berdasarkan BAST No : 076/SBP-LGL/VIII/2022 Tanggal 08 Agustus 2022 pada RSUKO Engku Haji Daud Prov Kepri)	2.000.000.000,00
- Mutasi BMD dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST No1857/BA-HB/PERLIK/XI/2025 Tanggal 20 November 2025	540.274.100,00

	2.540.274.100,00

Jumlah nilai aset tetap Peralatan Dan Mesin yang berasal dari Mutasi tahun 2024 , Aset yang jumlah belanjanya:

- Mutasi Masuk BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin bercasarkan BAST No270/ BAST-DINKES/ IV/ 2024 Tanggal 2 April 2024	769.750.000,00
- Mutasi BMD Peraletan dan Mesin dari Dinas Kesehatan berdasarkan BAST No 431/ BAST-DINKES/VI/2024 Tanggal 5 Juni 2024	3.330.200.000,00
- Reklasifikasi Aset Lain-lain BLUD ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	985.370.500,00
- Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024	537.060.000,00
	5.622.380.500,00

Jumlah nilai aset tetap Peralatan Dan Mesin yang berasal dari Mutasi tahun 2025 , Aset yang jumlah belanjanya:

- Mutasi Masuk BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin Reklas Dari Belanja Aset Lain (Belanja BLUD)	451.561.000,00
- Mutasi BMD Peralatan dan Mesin berdasarkan Hibah Dari Kemenkes Berdasarakan BAST no KN0108/C1/9364 Tanggal 20 Des 2024	1.310.000.000,00
	1.761.561.000,00

Jumlah nilai aset tetap Peralatan Dan Mesin yang berasal dari Mutasi Keluar tahun 2024 , Aset yang jumlah belanjanya:

- Pelunasan Utang Belanja Modal BLUD Tahun 2023	(16.350.000,00)
- Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran	(29.223.000,00)
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Tanda Bayar 2024) ke Persediaan Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	(10.800.000,00)
- Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakompatible	(56.839.000,00)
- Aset Rusak Berat/ Usang (Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang)	(126.143.600,00)
- Aset Rusak Berat/ Usang (Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya)	(13.893.658.979,00)
- Aset Rusak Berat/ Usang (Kendaraan Bermotor Beroda Dua)	(24.672.000,00)
	(14.157.686.579,00)

Jumlah nilai aset tetap Peralatan Dan Mesin yang berasal dari Mutasi Keluar tahun 2025 , Aset yang jumlah belanjanya:

- Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakompatable	(33.990.000,00)
- Pembayaran Belanja Tunda Bayar KIB B Tahun 2024	(536.550.000,00)
- Penghapusan BMD berdasarkan SK Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025	(49.300.000,00)
- Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Pemeliharaan	(179.415.000,00)
- Pengembalian Temuan BPK RI atas Selisih Harga Kegiatan Pengadaan UPS 200 KVA di RSIKO EHD Tahun2025	(18.550.000,00)
- Pengembalian Temuan BPK RI atas Kelebihan Ongkos Kirim Pada Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Medicore HRV di RSIKO EHD Tahun 2025	(4.000.000,00)
- Pengembalian Temuan BPK RI atas Kelebihan Bayar Ongkos Kirim Pada Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Neurofeedback di RSIKO EHD Tahun 2025	(13.009.000,00)
- Pengembalian Temuan BPK RI atas Kelebihan Bayar Ongkos Kirim Pada Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan TMS di RSIKO EHD Tahun 2025	(6.459.000,00)
	(841.313.000,00)

Jumlah nilai aset tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Mutasi Penambahan tahun 2024 Yang Belanja Dalam LRA Sebesar Rp 173300000, Aset yang jumlah belanjanya:

- Reklasifikasi dari Belanja Aset Lain-lain BLUD ke Aset Tetap Gedung	168.666.394,00
- Kapitalisasi Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	26.351.000,00
- Kapitalisasi dan Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi Pemeliharaan Rumah Sakit ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	119.850.000,00
	314.866.394,00

Jumlah nilai aset tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Mutasi Penambahan tahun 2025 Yang Belanja Dalam LRA Sebesar Rp 32941640000, Aset yang jumlah belanjanya:

- Kapitalisasi Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	969.979.272,00
- Kapitalisasi Jasa Review DED BLUD	95.000.000,00
- Mutasi BMD dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST No1858/BA-HB/PERLK/XI/2025 Tanggal 20 November 2025	7.166.475.976,00
	8.231.455.248,00

Jumlah nilai aset tetap aset tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Mutasi Keluar tahun 2025 , Aset yang jumlah belanjanya:

- Pengembalian Temuan BPK RI Kekurangan Volume Atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung Kantor (Pembangunan RSJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Lanjutan) pada Rumah sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Tahun 2025	(492.201.633,72)
	(492.201.633,72)

Jumlah nilai aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari Mutasi Penambahan tahun 2024 , Aset yang jumlah belanjanya:

- Reklasifikasi dari Aset Lain-lain BLUD ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	**99.140.000,00**

Jumlah nilai aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari Mutasi Penambahan tahun 2025 , Aset yang jumlah belanjanya:

- Reklasifikasi dari Aset Lain-lain BLUD ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	**28.023.000,00**

Jumlah nilai aset tidak Berwujud yang berasal dari Mutasi Pengurang tahun 2024 , Aset yang jumlah belanjanya:

- Reklasifikasi Aset Lain-lain BLUD ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(985.370.500,00)
- Reklasifikasi dari Belanja Aset Lain-lain BLUD ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(168.665.394,00)
- Reklasifikasi dari Aset Lain-lain BLUD ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	(99.140.000,00)
	(1.253.175.894,00)

Jumlah nilai Aset lain-lain yang berasal dari Mutasi Pengurang tahun 2025 , yang Jumlah Belanjanya di LRA sebesar Rp 479584000,-, Aset yang jumlah belanjanya:

- Reklasifikasi Aset Lain-lain BLUD ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(272.146.000,00)
- Reklasifikasi dari Aset Lain-lain BLUD ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	(28.023.000,00)
- Reklasifikasi dari Aset Lain-lain BLUD ke Pemeliharaan	(179.415.000,00)
- Penghapusan BMD berdasarkan SK Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025	(24.672.000,00)
- Penghapusan BMD berdasarkan SK Nomor 1027 Tahun 2025, Tanggal 23 Septeember 2025	(344.893.600,00)
	(849.149.600,00)

Akumulasi penyusutan aset tetap **(112.893.125.581,52)**

Jumlah tersebut merupakan Akumulasi penyusutan aset tetap nilai Aset Tetap per **31 Desember Tahun 2024 :**

- Tanah	-
- Gedung dan Bangunan	8.448.113.110
- Peralatan & Mesin	88.830.634.735
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.658.207.699
- Aset Tetap Lainnya	21.338.542
- Kontruksi dalam Pengerjaan	0.00
	98.958.493.486,10

Jumlah tersebut merupakan Akumulasi penyusutan aset tetap nilai Aset Tetap per **31 Desember 2025:**

- Tanah	**0,00**
- Gedung dan Bangunan	**11.880.707.296,15**
- Peralatan & Mesin	98.988.316.798,82
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	**1.999.750.444,56**
- Aset Tetap Lainnya	24.351.041,99
- Kontruksi dalam Pengerjaan	0,00
	112.893.125.581,52

Catatan: Aset tetap merupakan mutasi Tahun 2009, 2010,2011, 2012, 2013,14 dan tahun 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dan tahun 2025 sedangkan aset tetap sebelum tahun 2009 masih belum tercatat pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau karena ada serah terima

Aktiva lainnya..... **12.659.805.302,89**

Merupakan jumlah Koreksi tagihan biaya pelayanan tahun 2009, 2010,2011, dan tahun 2012 oleh RSUKO Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau yang tidak disetujui, Ditambah Reklasifikasi Aset Tetap Kontruksi dalam Pengerjaan Dan Aset yang tak berwujud lainya atas Pekerjaan yang telah Selesai pekerjaannya yang terdiri dari:

- **Aset Tak Berwujud**

- Belanja Modal Pengadaan Software Simstem Informasi rumah Sakit Tahun 2011	1.312.980.900,00
- Belanja Modal Pengadaan Software Online rumah Sakit Tahun 2019	64.750.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Software Pemasangan Aplikasi SISMADAK rumah Sakit Tahun 2019	8.000.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Software Implementasi Aplikasi System Antrian Pendaftaran Pasien rumah Sakit Tahun 2019	59.550.000,00

- Belanja Modal Aset Lainnya BLUD, Belanja WEB SETE Rumah Sakit Engku Haji Daud Tahun 2024	17.000.000,00
Total Aset Tak berwujud	**1.462.280.900,00**

- **Aset Lain-lain Tahun 2023**

- Merupakan jumlah Koreksi tagihan biaya pelayanan tahun 2009, 2010,2011, dan tahun 2012 oleh RSUKO Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau	658.871.262,89
- Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan Dan Aset yang tak berwujud lainya atau Pekerjaan yang telah Selesai pekerjaannya	84.220.000,00
- (Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan mesin dke Dalam Aset lainnya karena Rusak berat dan beban lain-lain (ekstrakompatable) karenan tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Engku Daud Tahun 2022)	9.675.526.140,00
- (Reklasifikasi dari Aset tetap Gedung dan Jeringan ke Dalam Aset lainnya karena Rusak berat pada Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud Tahun 2022)	887.800.000,00
- (Koreksi lebih catat karena hasil pemeriksaan BPK yang mengurangi nilai Beban Pegawai Tahun 2022)	2.002.440,00
- (Koreksi kelebihan pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Banguna Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Tahun 2023)	48.410.940,26
- (Koreksi kelebihan pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Tahun 2023)	96.937.505,00
- Aset Tetap Peralatan dan mesin ke Dalam Aset lainnya karena Rusak berat Alat Angkutan darat Bermotor, alat kedokteran lainnya, dan Kendaraan Bermotor Roda dua	14.044.474.579,00
Total Aset Lain-lain	**25.498.242.767,15**

- **Aset Lain-lain Tahun 2024**

- Penghapusan BMD (Aset Lainnya) berdasarkan SK Penghapusan No 1188 Tahun 2021 pada RSUKO Engku Haji Daud Prov Kepri	(84.220.000,00)
- (Jurnal Penyesuaian Pengembalian Temuan BPK RI atas Belanja Pegawai TA 2022 Pada RS Engku Haji Daud Prov Kepri)	(2.002.440,00)

(Jurnal Penyesuaian Pengembalian Temuan BPK RI atas Belanja - Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Tahun 2023 Yang dikembalikan Ke Kasda tahun 2024)	(48.410.840,26)
(Jurnal Penyesuaian Pengembalian Temuan BPK RI atas BelanjaBelanja - Modal Bangunan Gedung Kantor Tahun 2023, Yang di kembalikan Ke Kasda Tahun 2024)	(96.937.505,00)
	(231.570.785,26)

Aset Lain-lain Tahun 2025

- Belanja Modal dan Aset Lain-lain BLUD ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	479.584.000,00
- Reklasifikasi Aset Lain-lain BLUD ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(272.146.000,00)
- Reklasifikasi dari Aset Lain-lain BLUD ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	(28.023.000,00)
- Reklasifikasi dari Aset Lain-lain BLUD ke Pemeliharaan	(179.415.000,00)
- Penghapusan BMD berdasarkan SK Nomor 1797 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025	(24.672.000,00)
- Penghapusan BMD berdasarkan SK Nomor 1027 Tahun 2025, Tanggal 23 Sepetember 2025	(344.893.600,00)
	(369.565.600,00)
Total Aset Lain-lain	**24.897.105.361,89**

Akulasi Penyusutan Aset Lainya

- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	**(13.699.580.979,00)**

Nilai Buku Aset Tetap — 139.983.296.018,66

Kewajiban Jangka Pendek..... — 7.808.574.674,00

Desember 2025, yang terdiri dari Jumlah hutang tersebut merupakan Hutang Usaha per 31 Desember 2025, yang terdiri dari:

Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2025

- Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	314.250,00
	314.250,00

Hutang Belanja Barang dan Jasa Per tanggal 31 Desember 2025:

1 Hutang Barang Beban Terdiri dari:

- Duelime Industries, PT	33.275.540,00
- Enseval Putera Megatrading, PT	860.681.746,00
- Espana Inti Perkasa, PT	552.652.700,00

- Oasis Mitra Alkes, PT	207.541.015,00
- Parit Padang Global, PT	534.751.556,00
- Pelangi Rapha Semesta, PT	405.899.396,00
- Wido Abadi Perkasa, PT	46.765.000,00
- Amanah Jaya Bersama, PT	329.167.744,00
- Bintang Shafwan, PT	5.700.000,00
- Galoeh Husada Farma, PT	140.036.770,00
- Parit Padang Global, PT	38.448.345,00
- Kimia Farma, PT	356.096.912,00
- Millennium Pharmacon International, PT	76.804.974,00
- Interskala Sehat Sejahtera, PT	799.200.000,00
- Marga Nusantara Jaya, PT	10.000.000,00
- United Dico Citas, PT	29.653.251,00
- Belanja Isi Ulang Tabung Oksigen Liguid (Bulan Mei s/d Juni 2024)	279.731.200,00
- Belanja Isi Ulang Oksigen (Liquid & Tabung) 2025, Isi Ulang Oksigen dan N2O (CV Ideallis Alam Gas)	881.603.200,00
	5.587.999.151,00

2 Hutang Belanja Jasa

- Belanja Jasa Pelayanan Pasien bulan September Tahun 2025 (Jasa Pelayanan BPJS)	706.378.523,00
- Belanja Jasa Pelayanan Pasien bulan September Tahun 2025 (Jasa Pelayanan Umum)	53.321.382,00
- Belanja Jasa Pelayanan Pasien bulan Oktober Tahun 2025 (Jasa Pelayanan BPJS)	388.393.275,00
- Belanja Jasa Pelayanan Pasien bulan Oktober Tahun 2025 (Jasa Pelayanan Umum)	48.782.535,00
- Belanja Jasa Pelayanan Pasien bulan November Tahun 2025 (Jasa Pelayanan BPJS)	23.690.908,00
- Belanja Jasa Pelayanan Pasien bulan November Tahun 2025 (Jasa Pelayanan UMUM)	70.201.048,00
- Belanja Jasa Pelayanan Pasien bulan Desember Tahun 2025 (Jasa Pelayanan BPJS)	845.806.503,00
- Belanja Jasa Pelayanan Pasien bulan Desember Tahun 2025 (Jasa Pelayanan UMUM)	78.599.573
- Belanja Evakuasi dan Rujukan Parsial, Biaya Tiket Roro tanggal 16 sd 31 Desember 2025	1.220.276,00
- Belanja Evakuasi & Rujukan Parsial, Evakuasi Pasien Jiwa tanggal 16 sd 31 Desember 2025	253.250
- Belanja Evakuasi & Rujukan Parsial, Pengantaran Sampel dan Pengambilan Darah di PMI bulan Desember 2025	450.000
- Belanja Evakuasi & Rujukan Parsial, Kegatan Donor Darah Diluar Gedung RS tanggal 18 Desember 2025	1.200.000
- Belanja Jasa Tenaga Ahli Tim Pengamanan Pembangunan Strategis RSUKO EHD Periode bulan Juni sd Juli 2025	1.425.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Ahli Pendamping Hukum Pengadaan Prasarana RSUKO EHD, Periode bulan Agustus sd Desember 2025	540.000,00
	2.210.261.273,00

3 Hutang Belanja Modal

	0,00
	0,00

EKUITAS

132.174.721.344,66

Ekuitas Tahun 2025 dapat di uraikan sebagai berikut:

Ekuitas Awal Tahun 2025	**81.622.265.893,86**

Ekuitas Awal RSUKO Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 setelah dikurangi dengan Kewajiban Jangka Pendek Sebesar:

Surplus/Defisit LO tahun 2025	**(74.380.800.139,85)**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:

Koreksi Nilai Persediaan

	0,00
	0,00

Koreksi Selisih Revaluasi aset tetap lain-lain Tahun 2025

- Administrasi Pelunasan Piutang Retribusi pada RSUKO Engku Haji Daud Prov Kepri	(39.000,00)
- Penyesuaian atas saldo Penyisihan Piutang BLUD tahun 2024 yang telah dilunasi pada RSUKO Engku Haji Daud Prov Kepri	1.528.620,15
- Mutasi BMD dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST No1857/BA-HB/PERLK/XI/2025 Tanggal 20 November 2025	540.274.100,00
- Mutasi BMD dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST No1858/BA-HB/PERLK/XI/2025 Tanggal 20 November 2025 (Bangunan Kesehatan)	6.216.749.586,00
- Mutasi BMD dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST No1858/BA-HB/PERLK/XI/2025 Tanggal 20 November 2025 (Rumah Negara Golongan III)	949.726.990,00
- Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	27.334.458,35
- Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(2.361.512.462,86)
- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang (Penghapusan BMD berdasarkan SK Nomor 1927 Tahun 2025, Tanggal 23 Sepetember 2025)	346.883.600,00
	5.718.956.291,64

Kewajiban Yang Dikonsolidasikan Merupakan Belanja yang berasal dari dana Anggran APBD tahun 2025 yang terdiri dari:

• Belanja Pegawai	51.298.704.895,00
- Belanja Barang dan Jasa	13.562.040.604,00
• Belanja Modal	54.353.533.800,00
	119.214.279.299,00

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 139.983.296.018,66

Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

Pendapatan 20.674.050.980,84

Jumlah tersebut merupakan pendapatan RSUKO Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau selama periode Tahun 2025 yang terdiri dari jasa layanan rumah sakit dan pendapatan lain-lain PAD yang Sah RSUKO Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau, dengan rincian sebagai berikut:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan	20.471,285.096,00
- Lain-lain PAD yang Sah	202.765.884,84
	20.674.050.980,84

Pendapatan Retribusi Layanan Kesehatan Dengan Rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Layanan	20.664.995.452,00
- Pelunasan Piutang	(305.685.032,00)
- Piutang Tahun 2025	111.974.676,00
	20.471.285.096,00

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah- LO Dengan Rincian sebagai berikut:

Pengembalian Temuan BPK RI atas Denda Keterlambatan Kegiatan - Pengadaan UPS 200 KVA di RSUKO EHD Tahun2025	84.864.864,84
- Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	81.608.108,00
- Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha-LO	36.292.912,00
	202.765.884,84

Pendapatan Lain-lain yang Sah 1.649.962.204,00

• Mutasi Tambah dari Hibah Dari Kemenkes Berdasaraka BAST no KN01 08/C1/9364 Tanggal 20 Desember 2024	1.310.000.000,00

-	Mutasi Tambah dari HIBAH - Obatan - Obat DINKES BINTAN	339.962.204,00
		1.649.902.204,00

BEBAN

Beban Operasional

84.684.898.491,90

Merupakan belanja yang dikeluarkan untuk operasional RSUKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2025 yang terdiri atas:

-	Beban Pegawai	55.669.828.988,00
-	Beban Barang dan Jasa	29.015.069.503,90
		84.684.898.491,90

Beban pegawai merupakan belanja yang dikeluarkan untuk membayar gaji dan honor pegawai baik yang secara langung berhubungan dengan operasional yang melekat pada kegiatan maupun yang tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan operasional (kegiatan) yang dapat dirinci sebagai berikut:

-	Beban Pegawai	55.669.828.988,00
-	Beban Barang dan Jasa	29.015.069.503,90
		84.684.898.491,90

Beban Belanja pegawai tidak langsung merupakan belanja yang dikeluarkan untuk membayar Belanja Pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS yang dapat dirinci sebagai berikut:

Beban Gaji dan Tunjangan ASN

-	Beban Gaji Pokok PNS	10.561.140.000,00
-	Beban Gaji Pokok PPPK	3.584.047.662,00
-	Beban Tunjangan Keluarga PNS	1.013.805.530,00
-	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	246.476.644,00
-	Beban Tunjangan Jabatan PNS	244.230.000,00
-	Beban Tunjangan Fungsional PNS	1.061.265.000,00
-	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	181.255.833,00
-	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	80.720.000,00
-	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	104.230.000,00
-	Beban Tunjangan Beras PNS	609.197.040,00

- Beban Tunjangan Beras PPPK	208.690.300,00
- Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.657.167,00
- Beban Pembulatan Gaji PNS	156.082,00
- Beban Pembulatan Gaji PPPK	69.952,00
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.143.084.604,00
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	252.030.549,00
- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	21.804.483,00
- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	8.190.881,00
- Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	65.413.506,00
- Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	24.590.053,00
	19.422.061.286,00

Beban Tambahan Penghasilan ASN

- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13.283.553.816,00
- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.569.753.401,00
- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.969.737.809,00
- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	143.155.360,00
- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.606.141.886,00
- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12.198.499.117,00
- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.103.505.948,00
	31.874.357.337,00

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

- Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00
- Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00
	0,00

Beban Beban Pegawai BLUD

- Beban Pegawai BLUD	4.373.410.365,00
	4.373.410.365,00

Beban barang dan jasa merupakan belanja yang dikeluarkan untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa dalam rangka kegiatan operasional RSJKO Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau selama tahun 2025 yang terdiri atas;

Beban Barang

- Beban Barang Pakai Habis	0,00
- Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	17.380.000,00
- Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	251.715.650,00
- Beban Bahan-Bahan Lainnya	3.560.000,00
- Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00
- Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	4.000.000,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	61.305.000,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	157.490.390,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	593.145.499,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.288.600,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	54.922.356,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cenderamata	33.266.500,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00
- Beban Obat-Obatan-Obat	264.506.336,00
- Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.015.817.020,90
- Beban Natura dan Pakan-Natura	21.915.368,00
- Beban Natura dan Pakan-Pakan	0,00
- Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	415.609.222,00
- Beban Makanan dan Minuman Rapat	24.240.000,00
- Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	39.979.000,00
- Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	96.540.000,00
- Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00
- Beban Pakaian Olahraga	71.412.000,00
- Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.610.000,00

- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	31.380.000,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga	0,00
- Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00
	3.164.082.941,50

Beban Jasa

- Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.200.000,00
- Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	10.200.000,00
- Beban Jasa Tenaga Kesehatan	731.594.250,00
- Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.390.208.770,00
- Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.098.837.000,00
- Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.004.247.330,00
- Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	456.929.000,00
- Beban Tagihan Telepon	11.291.984,00
- Beban Tagihan Air	87.369.300,00
- Beban Tagihan Listrik	1.097.185.230,00
- Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	183.578.251,00
- Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.868.260
- Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	733.386.000,00
- Beban Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh W	11.600.342,00
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	106.203.610,00
- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	27.840,00
- Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	83.522,00
- Beban Sewa Peralatan dan Mesin	0,00
- Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00
- Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	74.850.000,00
- Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	18.000.780,00

-	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00
-	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00
-	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	17.150.000,00
-	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	19.870.000,00
-	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	59.375.000,00
-	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	17.600.000,00
-	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	179.415.000,00
-	Beban Perjalanan Dinas Biasa	192.923.701,00
-	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	624.000,00
-	Beban Barang dan Jasa BLUD	18.300.365.392,00
-	Beban Penyisihan Piutang	0,00
-	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	0,00
-	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	0,00
-	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	0,00
		25.850.986.562,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi

11.600.455.090,91

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan Akumulasi penyusutan aset tetap nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025:

-	Tanah	0,00
-	Gedung dan Bangunan	1.071.082.722,80
-	Peralatan & Mesin	10.184.816.522,51
-	Jalan, Irigasi dan Jaringan	341.543.345,56
-	Aset Tetap Lainnya	3.012.500,04
-	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00
		11.600.455.090,91

Beban Penyisihan Piutang

594.141,88

Beban Penyisihan piutang tahun 2025, total Piutangnya sebesar Rp 139720397,00 terdiri dari :

- BPJS KESEHATAN	0,00	
- PT INHEALTH	2.939,00	
- TCM	27.600,00	
- PP ALILA VILLA	0,00	
- PP CONDOTEL	0,00	
- HUTAMA KARYA	0,00	
- BINTAN LAGOON	0,00	
PERTAMINA	166.222,23	
- TASPEN	34.268,50	
- INDEMNITY	0,00	
- AMODA	21.702,50	
- KEMENKES	0,00	
- JASA RAHARJA	8.298,65	
- JAMKESDA PROVINSI	333.111,00	
	594.141,88	

Beban Lain-lain

Kegiatan Non Operasional		**418.865.600,00**
- Penghapusan BMD berdasarkan SK Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025	24.672.000,00	
- Penghapusan BMD berdasarkan SK Nomor 1027 Tahun 2025, Tanggal 23 Sepetember 2025	344.893.600,00	
- Penghapusan BMD berdasarkan SK Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025	49.300.000,00	
	418.865.600,00	

SURPLUS/DEFISIT-LO	**(74.380.800.139,85)**

Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas Awal Tahun 2023 — 58.503.631.249,26

Ekuitas Awal RSUKD Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 setelah dikurangi dengan Kewajiban Jangka Pendek Sebesar:

Surflus/Defifit LO tahun 2023 — (72.991.632.400,47)

- Pendapatan LO	19.393.486.185,00
- Pendapatan Hibah LO	229.474.304,00
- Beban Pegawai LO	45.505.445.180,00
- Beban Barang dan Jasa LO	38.860.870.374,44
- Beban Penyusutan Dan Amortisasi LO	8.247.396.958,00
- Beban Penyisihan Piutang LO	690.377,03
- Beban Lain-lain	0,00
	(72.991.632.400,47)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: — (128.447.360,83)

Koresi Ekuitas Lainnya Yaitu:

- Penyesuaian Akumulasi Penyusutan akibat Aset Tetap yang Tidak Tersusutkan pada Tahun Sebelumnya	(135.390.732,00)
- Tahun Sebelumnya	
– DPJS KESEHATAN	6.887.461,18
– Limbah	6.160,00
– P2PML	49.750,00
	(128.447.360,83)

Kewajiban Yang Dikonsolidasikan Merupakan Belanja yang berasal dari dana Anggaran APBD tahun 2023 yang terdiri dari: — **102.375.305.471,00**

1 **Belanja Pegawai yang terdiri dari :**

- Belanja Gaji Pokok PNS	9.498.527.000,00
- Belanja Gaji Pokok PPPK	198.990.800,00
- Belanja Tunjangan Keluarga PNS	892.398.596,00
- Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9.019.528,00
- Belanja Tunjangan Jabatan PNS	220.690.000,00
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	913.645.000,00
- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	18.680.000,00
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	102.015.000,00
- Belanja Tunjangan Beras PNS	601.882.620,00
- Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.157.340,00
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.676.415,00
- Belanja Pembulatan Gaji PNS	156.013,00
- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.335,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.101.143.290,00

- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	43.434.527,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	19.644.366,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	477.572,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	58.933.175,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.432.748,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	11.048.902.443,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	490.551.933,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.686.297.117,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	46.837.754,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.092.355.820,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	10.850.187.048,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	329.902.413,00
- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	716.405.000,00
- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	14.960.000,00
Total Belanja Pegawai per 31 Desember 2023	**40.974.750.851,00**

2 Belanja Barang dan Jasa Terdiri dari:

- Belanja Bahan-Bahan Kimia	141.500.000,00
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	531.909.250,00
- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	205.241.500,00
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	42.220.000,00
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	219.410.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	379.421.400,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	148.857.500,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	810.841.100,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	182.108.980,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	16.500.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	94.250.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	11.100.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	255.950.000,00
- Belanja Obat-Obatan-Obat	2.880.000,00
- Belanja Natura dan Pakan-Natura	411.935.200,00
- Belanja Natura dan Pakan-Pakan	2.424.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	249.834.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	31.055.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30.600.000,00
- Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	21.250.000,00
- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	185.150.000,00
- Belanja Pakaian KORPRI	147.000.000,00
- Belanja Pakaian Olahraga	12.000.000,00
- Honorarium Rohaniwan	8.800.000,00
- Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	16.000.000,00

- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.340.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.261.161.205,00
- Belanja Jasa Tenaga Ahli	257.100.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.746.648.000,00
- Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	500.500.000,00
- Belanja Tagihan Telepon	72.323.965,00
- Belanja Tagihan Listrik	990.795.688,00
- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	70.009.001,00
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	35.959.300,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	261.196.917,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12.082.875,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	15.103.473,00
- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.360.000,00
- Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	412.000,00
- Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	4.920.000,00
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	75.000.000,00
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	4.698.000,00
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	97.357.878,00
- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.161.970.755,00
- Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.319.555.990,00
- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	296.550.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	67.430.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	160.766.500,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	48.720.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	265.650.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	698.406.000,00
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	98.920.000,00
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	989.250.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	662.545.673,00
Total Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023	**19.342.765.160,00**

Belanja Modal Terdiri dari:

- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	591.600.000,00
- Belanja Modal Alat Pembersih	1.520.000.000,00
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	218.000.000,00
- Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	105.350.000,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	8.876.391.900,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	678.600.000,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	4.180.000.000,00
- Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	2.250.000.000,00
- Belanja Modal Personal Computer	668.450.000,00

- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	178.100.000,00	
- Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	22.773.300.000,00	
Total Belanja Modal 31 Desember 2023	**42.059.791.900,00**	
- (Koreksi lebih catat karena hasil pemeriksaan BPK yang mengurangi nilai Beban Pegawai Tahun 2022)	**2.002.440,00**	
	2.002.440,00	
		87.758.756.958,97

Ekuitas Akhir RSJKO Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau Per 31 Desember 2023 Sebesar Rp 87758756958,97

Ekuitas Awal Tahun 2024 — 87.758.756.958,97

Ekuitas Awal RSJKO Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 setelah dikurangi dengan Kewajiban Jangka Pendek Sebesar:

Surplus/Defifit LO tahun 2024 — (77.410.578.090,16)

- Pendapatan LO	22 725.462.351,00
- Pendapatan Hibah LO	202.594.752,00
- Beban Pegawai LO	52.835.898.137,00
- Beban Barang dan Jasa LO	35.654.127.122,79
- Beban Penyusutan Dan Amortisasi LO	11.846.894.409,60
- Beban Penyisihan Piutang LO	1.715.523,77
- Beban Lain-lain	0,00
	(77.410.578.090,16)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: — 4.402.588.014,31

Koreksi Nilai Persediaan

- Mutasi Tambah obat Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK TA2023 sebesar Rp 316046065,78 pada BLUD RSJKO Engku Haji Daud	316.046.065,78
	316.046.065,78

Koresi Ekuitas Lainnya Yaitu:

Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Daerah

Tahun Sebelumnya

- BPJS KESEHATAN	276.500,47
- PT INHEALTH	5.826,56
- TCM	65.500,00
	347.827,03

- Mutasi BMD Peralatan dan Mesin dari Dinas Kesehatan berdasarkan BAST No 431/ BAST-DINKES/VI/2024 Tanggal 5 Juni 2024 Pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud sebesar Rp3330200000,-	3.330.200.000,00
- Mutasi Masuk BMD Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST No270/ BAST-DINKES/ IV/ 2024 Tanggal 2 April 2024 dari Dinas Kesehatan sebesar Rp769750000	769.750.000,00
- Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD (Selisih Pencatatan Nilai Utang Tahun 2023 Lebih Besar Setelah Review Sebesar Rp 12600056)	12.600.056,00
- Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	(25.388.159,50)
- Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	(957.775,00)
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi (Koreksi Ekuitas - Lain-lain)	0,09
	4.086.184.121,50

Kewajiban Yang Dikonsolidasikan Merupakan Belanja yang berasal dari dana Anggaran APBD tahun 2024 yang terdiri dari: **66.871.519.010,74**

1 **Belanja Pegawai yang terdiri dari :**

- Belanja Gaji Pokok PNS	10.355.339.600,00
- Belanja Gaji Pokok PPPK	1.053.117.800,00
- Belanja Tunjangan Keluarga PNS	998.700.374,00
- Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	58.179.086,00
- Belanja Tunjangan Jabatan ASN	247.330.000,00
- Belanja Tunjangan Jabatan PNS	0,00
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.018.306.000,00
- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	96.385.000,00
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	73.345.000,00
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00
- Belanja Tunjangan Beras PNS	605.865.720,00
- Belanja Tunjangan Beras PPPK	49.824.960,00
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12.327.253,00
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00
- Belanja Pembulatan Gaji PNS	164.886,00
- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	19.034,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.130.224.543,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	124.946.808,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	21.233.497,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.189.344,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	63.700.756,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	6.567.996,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13.089.659.899,00

- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.364.123.692,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.938.386.876,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	124.372.282,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.912.022.669,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12.028.693.009,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	947.326.937,00
- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	677.228.000,00
- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00
- Belanja Pegawai BLUD	0,00
Total Belanja Pegawai per 31 Desember 2024	**48.007.734.981,00**

2 Belanja Barang dan Jasa Terdiri dari:

- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	173.300.000,00
- Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	164.353.500,00
- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	30.900.000,00
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	304.950.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	49.466.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	54.257.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	773.513.600,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.480.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	34.000.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	98.269.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cenderamata	25.485.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	477.750.000,00
- Belanja Obat-Obatan-Obat	0,00
- Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.700.444.764,00
- Belanja Natura dan Pakan-Natura	330.820.773,00
- Belanja Natura dan Pakan-Pakan	0,00
- Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	134.828.495,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.369.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	28.260.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	46.517.500,00
- Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00
- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00
- Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	87.000.000,00
- Belanja Pakaian KORPRI	0,00
- Belanja Pakaian Olahraga	0,00
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.000.000,00

- Honorarium Rohaniwan	0,00
- Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	21.000.600,00
- Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.608.929.500,00
- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.193.353.499,00
- Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00
- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.964.720.000,00
- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	383.350.000,00
- Belanja Tagihan Telepon	46.924.290,00
- Belanja Tagihan Air	29.122.200,00
- Belanja Tagihan Listrik	1.037.999.669,00
- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	97.697.455,00
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.609.700,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	240.059.722,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	14.517.366,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	18.146.720,00
- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00
- Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00
- Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	0,00
- Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	14.900.000,00
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000,00
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra De	0,00
- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00
- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaa	26.351.000,00
- Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00
- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	49.550.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	206.865.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	0,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	72.585.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	200.190.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	99.600.000,00
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	966.920.300,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	580.442.422,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.500.000,00
Total Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024	**15.531.308.875,00**

Belanja Modal Terdiri dari:

- Belanja Modal Alat Angkutan	0,00

- Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	
- Belanja Modal Alat Pengolahan	54.350.000,00	
- Belanja Modal Alat Kantor	421.290.000,00	
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga	361.882.000,00	
- Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	
- Belanja Modal Alat Studio	12.360.000,00	
- Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.617.060.500,00	
- Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	
- Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	
- Belanja Modal Komputer Unit	339.150.000,00	
- Belanja Modal Peralatan Komputer	498.425.000,00	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	173.300.000,00	
Total Belanja Modal 31 Desember 2024	**3.477.823.500,00**	
- Aset Tetap yang tidak digunakan Dlam Operasional Pemorintah (Jurnal Penyesuaian Pengembalian Temuan BPK RI atas Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Banguna Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Tahun 2023 Yang dikembalikan Ke Kasda tahun 2024)	(48.410.840,76)	
- Aset Tetap yang tidak digunakan Dlam Operasional Pemerintah (Jurnal Penyesuaian Pengembalian Temuan BPK RI atas BelanjaBelanja Modal Bangunan Gedung Kantor Tahun 2023, Yang di kembalikan Ke Kasda Tahun 2024)	(96.937.505,00)	
	(145.348.345,26)	
		81.622.285.893,86

Ekuitas Akir RSJKO Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau Per 31 Desember 2024 Sebesar Rp 81.622.285.893,86

Ekuitas Awal Tahun 2025

81.622.285.893,86

Ekuitas Awal RSJKO Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 setelah dikurangi dengan Kewajiban Jangka Pendek Setesar:

Surflus/Deflfit LO tahun 2025

(74.380.800.139,85)

- Pendapatan Retribusi Daerah-LO	20.471,285,096,00
- Pendapatan Lain-lain PAD yang sah-LO	202.765.884,84
- Pendapatan Hibah LO	1.649.962.204,00
- Beban Pegawai LO	55.669.828.988,00
- Beban Barang dan Jasa LO	29.015.069,503,90
- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin- LO	10.184-816.522,51
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan- LO	1.071.082.722,80
- Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi- LO	341.543.345,56
- Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya- LO	3.012.500,04

- Beban Penyisihan Piutang LO	594.141,88
- Beban Lain-lain	0,00
- Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	418.865.600,00
	(74.380.800.139,85)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: 5.718.956.291,65

Koreksi Nilai Persediaan

	0,00
	0,00

Koreksi Ekuitas Lainnya Yaitu:

Penyisihan Piutang Kompensasi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat

Tahun Sebelumnya

- BPJS Kesehatan	115.430,00
- PT Inhealth	91.769,68
- TCM	16.750,00
- Pertamina	244.645,15
- Indemnity	24.183,01
- AMODA	108.352,50
- KEMENKES	929.489,83
	1.528.620,16

- Administrasi Penunasan Piutang Retribusi pada RSJKO Engku Haji Daud Prov Kepri	(39.000,00)
- Mutasi BMD dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST No1857/BA-HB/PERLK/XI/2025 Tanggal 20 November 2025	540.274.100,00
- Mutasi BMD dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST No1858/BA-HB/PERLK/XI/2025 Tanggal 20 November 2025 (Bangunan Kesehatan)	6.216.749.586,00
- berdasarkan BAST No1858/BA-HB/PERLK/XI/2025 Tanggal 20 November 2025 (Rumah Negara Golongan III)	949.726.390,00
- Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	27.334.458,35
- Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(2.361.511.462,86)
- Penghapusan BMD berdasarkan SK Nomor 1027 Tahun 2025, Tanggal 23 Sepetember 2025)	344.893.660,00
	5.717.427.671,49

Kewajiban Yang Dikonsolidasikan Merupakan Belanja yang berasal dari dana Anggaran APBD tahun 2025 yang terdiri dari: **119.214.279.299,00**

1 **Belanja Pegawai yang terdiri dari :**

- Belanja Gaji Pokok PNS	10.564.140.000,00
- Belanja Gaji Pokok PPPK	3.584.047.662,00
- Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.014.704.122,00
- Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	246.778.074,00
- Belanja Tunjangan Jabatan PNS	244.230.000,00
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.061.265.000,00
- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	181.255.833,00
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	80.720.000,00
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	104.230.000,00
- Belanja Tunjangan Beras PNS	609.848.820,00
- Belanja Tunjangan Beras PPPK	209.124.820,00
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.657.167,00
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00
- Belanja Pembulatan Gaji PNS	156.062,00
- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	69.952,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.343.084.604,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	252.038.549,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	21.804.483,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	8.196.881,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	65.413.506,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	24.590.053,00
- Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0,00
- Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	0,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13.283.553.816,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.569.753.401,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.969.737.809,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	143.165.360,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.606.141.886,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12.198.499.117,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.103.505.948,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00
Belanja Honorarium	0,00
- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00
- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00
- Belanja Pegawai BLUD	0,00
Total Belanja Pegawai per 31 Desember 2025	**51.298.704.895,00**

2 Belanja Barang dan Jasa Terdiri dari:

- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	17.380.000,00

- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	284.515.650,00
- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.560.000,00
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	4.000.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	62.742.500,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	180.918.509,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	644.217.199,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.288.600,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	42.529.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cenderea Mata	33.266.560,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan	46.840.000,00
- Belanja Obat-Obatan-Obat	2.999.304.358,00
- Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00
- Belanja Natura dan Pakan-Natura	156.322.950,00
- Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	459.768.857,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.240.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	39.979.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	56.540.000,00
- Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00
- Belanja Pakaian Olahraga	71.412.000,00
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.200.000,00
- Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	10.200.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	731.594.250,00
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.380.208.770,00
- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.098.837.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.004.247.330,00
- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	466.929.000,00
- Belanja Tagihan Telepon	11.201.384,00
- Belanja Tagihan Air	87.369.300,00
- Belanja Tagihan Listrik	1.097.185.230,00
- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	183.578.251,00
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.868.260,00
- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	733.388.000,00
- Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	11.600.342,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	106.209.610,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	27.840,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	83.522,00
- Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00
- Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	74.850.000,00
- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaa	969.979.272,00
- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	18.000.780,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00

- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	17.150.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	99.870.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	59.375.000,00
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	17.600.000,00
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	192.923.701,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	624.000,00
Total Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025	**13.562.040.804,00**

## **Belanja Modal Terdiri dari:**	
- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	180.290.000,00
- Belanja Modal Alat Pendingin	1.050.000,00
- Belanja Modal Alat Dapur	2.250.000,00
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00
- Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00
- Belanja Modal Alat Studio	0,00
- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	9.941.291.000,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran THT	0,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa	0,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.262.300.000,00
- Belanja Modal Personal Computer	236.562.800,00
- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	60.660.000,00
- Belanja Modal Peralatan Jaringan	20.050.000,00
- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00
- Belanja Modal Sumur Lainnya	1.565.000.000,00
- Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	32.941.640.000,00
- Belanja Modal Bangunan Kesehatan	0,00
- Belanja Modal Instalasi Lain	6.163.040.000,00
Total Belanja Modal 31 Desember 2025	**54.353.533.800,00**

132.174.721.344,66

Ekuitas Akhir RSJKO Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau Per 31 Desember 2025 Sebesar Rp 132.174.721.344,66

Penjelasan Atas Laporan Arus Kas Per 31 Desember 2025

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi .....

Merupakan selisih aktivitas penerimaan kas dan pengeluaran kas yang

Arus Kas Masuk, terdiri dari:

- Pendapatan APBD	119.544.644.322,00
- Pendapatan jasa layanan	20.782.896.472,00
- Pendapatan Lainnya, Merupakan Pendapatan lain BLUD	
- Pendapatan Layanan lainya	0,00
- Pendapatan Jasa Giro	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**140.327.540.794,00**

Arus Kas Keluar, terdiri dari:

- Belanja Pegawai	55.672.115.260,00
- Belanja Persediaan	5 170.855.162,00
- Belanja Jasa	8.003.642.741,00
- Belanja Pemeliharaan	193.995.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas	193.547.701,00
- Belanja Barang dan jasa BLUD	16.376.207.115,00
Jumlah Biaya Pelayanan	**85.610.362.979,00**

Rincian Biaya Tersebut Terdiri dari

1 Belanja Pegawai Terdiri dari:

- Belanja Gaji Pokok PNS	10.564.140.000,00
- Belanja Gaji Pokok PPPK	3.584.017.662,00
- Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.014.704.122,00
- Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	246.778.024,00
- Belanja Tunjangan Jabatan PNS	244.230.000,00
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.061.265.000,00
- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	181.255.833,00
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	80.720.000,00
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	104.230.000,00
- Belanja Tunjangan Beras PNS	609.848.820,00
- Belanja Tunjangan Beras PPPK	209.124.820,00
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.657.167,00
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00

- Belanja Pembulatan Gaji PNS	156.082,00
- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	69.952,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.143.084.604,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	252.030.549,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	21.804.483,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	8.196.883,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	65.413.506,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	24.590.053,00
- Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0,00
- Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	0,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13.283.553.816,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.569.753.403,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.969.737.809,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	143.165.360,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.606.141.886,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12.198.499.117,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.103.505.948,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00
- Belanja Honorarium	0,00
- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00
- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00
- Belanja Pegawai Bl UD	4.373.410.365,00
Total	**55.672.115.260,00**

2 Belanja Persediaan terdiri dari:

- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	17.380.000,00
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	284.515.650,00
- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.560.000,00
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	4.000.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	62.742.500,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	180.918.308,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	644.247.199,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.288.600,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	42.529.000,00

-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	33.266.500,00
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	46.640.000,00
-	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.999.304.358,00
-	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00
-	Belanja Natura dan Pakan-Natura	156.322.990,00
-	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	459.768.857,00
-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.240.000,00
-	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	39.979.000,00
-	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	96.540.000,00
-	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00
-	Belanja Pakaian Olahraga	71.412.000,00
	Total	**5.170.855.162,00**

3 Belanja Jasa

-	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.200.000,00
-	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	10.200.000,00
-	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	731.594.250,00
-	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.386.208.770,00
-	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.098.837.000,00
-	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.004.247.330,00
-	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	466.929.000,00
-	Belanja Tagihan Telepon	11.291.984,00
-	Belanja Tagihan Air	87.369.300,00
-	Belanja Tagihan Listrik	1.097.185.230,00
-	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	163.578.251,00
-	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.866.260,00
-	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	733.386.000,00
-	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh W	11.600.342,00
-	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	106.203.610,00
-	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	27.840,00
-	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	83.522,00
-	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor untuk Penumpang	0,00
-	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00
-	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	74.850.000,00
-	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	969.979.272,00
-	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	18.000.780,00
	Total	**8.003.642.741,00**

4 Belanja Pemeliharaan

- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	17.150.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	99.870.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	59.375.000,00
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	17.600.000,00
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00
Total	**193.995.000,00**

5 Belanja Perjalanan Dinas

- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	192.923.701,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	624.000,00
Total	**193.547.701,00**

6 Belanja Barang dan Jasa BLUD

- Belanja Barang dan Jasa BLUD	16.376.207.115,00
	16.376.207.115,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi **54.717.177.815,00**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

Merupakan arus kas keluar atas pengadaan Aset Tetap RSIKO Engku Haji Daud selama tahun 2025 yaitu:

- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	180.250.000,00
- Belanja Modal Alat Pendingin	1.050.000,00
- Belanja Modal Alat Dapur	2.250.000,00
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00
- Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00
- Belanja Modal Alat Studio	0,00
- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	9.941.291.000,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran THT	0,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa	0,00

- Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.262.300.000,00		
- Belanja Modal Personal Computer	216.562.800,00		
- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	60.060.000,00		
- Belanja Modal Peralatan Jaringan	20.050.000,00		
- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00		
- Belanja Modal Sumur Lainnya	1.565.000.000,00		
- Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	32.941.640.000,00		
- Belanja Modal Bangunan Kesehatan	0,00		
- Belanja Modal Instalasi Lain	6.163.040.000,00		
- Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	479.584.000,00		
Total	**54.833.117.800,00**		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Non Keuangan			**(54.833.117.800,00)**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan dan Pembiayaan			
Merupakan selisih penerimaan kas dan pengeluaran kas dari aktivitas			
Arus Kas Masuk, terdiri dari:			
- Penerimaan pinjaman	0,00		
Arus Kas Keluar, terdiri dari:			
- Penyetoran Ke Kas Daerah Terdiri dari	1.014.304,00		
- Pengembalian SSTU dan SSUP RSUD EHD PROV KEPRI TA 2024	329.350.719,00		
Total	**330.365.023,00**		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan dan Pembiayaan			**(330.365.023,00)**
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
Jumlah Arus Kas Masuk	6.909.230.734,00		
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
Jumlah Arus Kas Keluar	6.908.916.484,00		
Total	**314.250,00**		
			314.250,00
Kenaikan /(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode			
Merupakan nilai bersih penjumlahan seluruh aktivitas kas selama			**(445.090.758,00)**
Saldo Awal BLUD			

- **Bendahara Penerimaan BLUD dengan rincian :**

Uang Tunai	3.049.249,00
Rekening Bank	0,00

- **Bendahara Pengeluaran dan Pengeluaran BLUD dengan rincian :**

Rekening Bank	634.511.002,48
	637.554.251,48

Saldo Awal Kas di BLUD tahun 2025	**637.554.251,48**

Saldo Akhir Kas di BLUD tahun 2025	**191.563.493,48**

Penjelasan Atas Pos – Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a Saldo Anggaran Lebih awal;
b Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
c Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
d Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
e Lain-lain;
f Saldo Anggaran Lebih akhir

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah daerah. Di samping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur - unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Saldo Anggaran Lebih Awal

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	**637.554.251,48**	**2.814.593.499,48**

Pada awal tahun 2025, RSUKD Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau mencatat Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp 637554251,48 yang merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**637.554.251,48**	**2.814.593.499,48**

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan digunakan dalam rangka membiayai defisit APBD tahun anggaran berjalan. Penggunaan SAL dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. SAL dilaporkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. SAL sebagaimana merupakan bagian dari ekuitas dana dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Sebesar Rp Rp Rp 637554251,48

Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)	**191.563.493,48**	**637.554.251,48**

SiLPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/ kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan Nilai SILPA/SIKPA pada akhir periode pelaporan Tahun 2025 Sebesar Rp 191563493,48

1. PENDAHULUAN

1.1 Letak Geografis RSJKO Engku Haji Daud

Provinsi Kepulauan Riau dibentuk pada tahun 2002 yang didasarkan pada UU nomor 25 tahun 2002 dan secara defenitif berjalan sejak tahun 2004. Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang ke – 32 di Indonesia. Pada tahun 2006, provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 4 kabupaten dan 2 kota, 274 desa/kelurahan, dan 45 kecamatan. Nama-nama kabupaten/kota tersebut yaitu

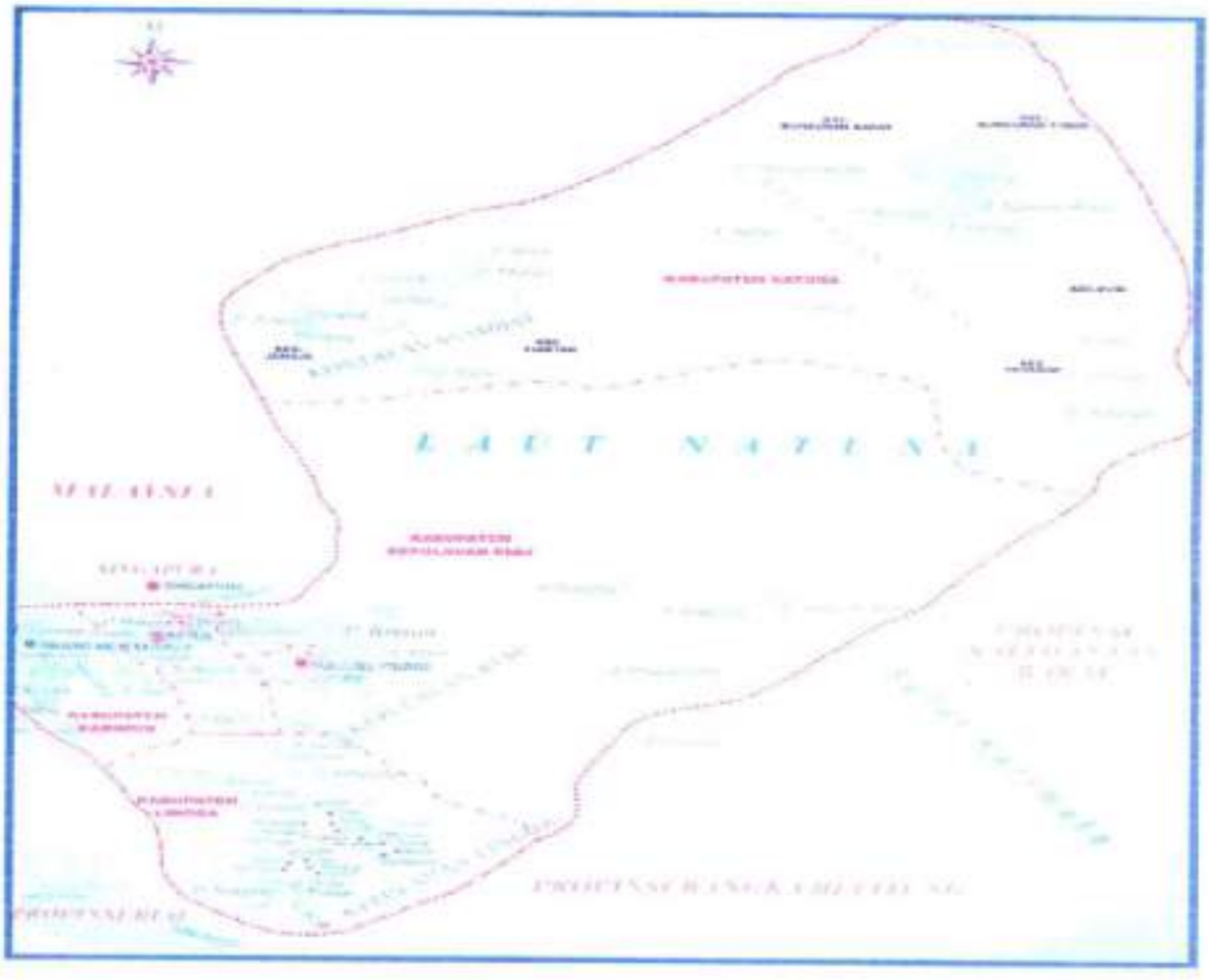
1. Kabupaten Bintan, ibukotanya Bintan Bunyu.
2. Kabupaten Karimun, ibukotanya Tanjung Balai Karimun
3. Kabupaten Natuna, ibukotanya Ranai.
4. Kabupaten Lingga, ibukotanya Daik
5. Kota Tanjungpinang, ibukotanya Tanjungpinang
6. Kota Batam, ibukotanya Batam

Secara geografis Provinsi Kepulauan Riau terletak pada 04°15' LU - 0°45' LS dan 103°11' - 109°10' BT. Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil kurang lebih 2.408 buah dimana sebanyak 366 pulau telah berpenghuni dan 2.042 pulau belum berpenghuni. Luas total wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah 253.420 km² terdiri dari luas lautan 242.825 km² (96 %), dan luas daratan 10.595,41 km² (4 %).

Provinsi Kepulauan Riau memiliki batas wilayah, yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Negara Vietnam dan Kamboja
- Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi.
- Sebelah barat berbatasan dengan Negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau.
- Sebelah timur berbatasan dengan Negara Malaysia Timur dan Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk lebih jelasnya mengenai wilayah administrasi wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dapat dilihat pada gambar berikut :



A. Latar Belakang

Untuk tercapainya tujuan pembangunan dibutuhkan antara lain tersedianya sumber daya manusia yang tangguh, mandiri dan berkualitas. Menyadari bahwa tercapainya tujuan pembangunan merupakan kehendak dari seluruh masyarakat, dan dalam rangka menghadapi makin ketatnya persaingan bebas pada era globalisasi, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan. Dalam hal ini peranan keberhasilan pembangunan kesehatan sangat menentukan. Penduduk yang sehat bukan saja akan menunjang keberhasilan program pendidikan, tetapi juga akan mendorong peningkatan produktifitas dan pendapatan penduduk.

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan. Jika pada tahun 2004 jumlah penduduk 1.235.054 jiwa, bertambah menjadi 1.273.011 jiwa pada tahun 2005, dan pada tahun 2006 bertambah lagi menjadi 1.337.863 jiwa. Berarti terjadi pertambahan penduduk sebesar 9,5 %.

Data komposisi penduduk menurut jenis kelamin (sex ratio) pada tahun 2006 tidak diketahui, namun diprediksi tidak jauh berbeda dengan keadaaan komposisi penduduk pada tahun 2005 mengingat pertumbuhan penduduk yang konstan. Pada tahun 2005 jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki yang dilunjukkan dengan sex ratio sebesar 99,87. Hal ini kemungkinan disebabkan bahwa mayoritas industri di provinsi Kepulauan riau bergerak dibidang elektronika dan garmen yang banyak memperkerjakan karyawan wanita.

RSJKO Engku Haji Daud terletak di wilayah Kabupaten Bintan, adapun letak geografis kabupaten Bintan terletak diantara 0°15'LU dan 104°10' - 105°0' BT, memiliki letak geografis yang strategis, dan memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi serta mudah dicapai baik melalui laut dengan memanfaatkan 2 (dua) pelabuhan international di Tanjungpinang dan Lagoi maupun melalui udara yaitu bandara Raja Haji Fisabilillah.

Kondisi ini secara tidak langsung memberikan peluang yang besar untuk menarik wisalawan domestik maupun international. Keberadaan kawasan wisata Lagoi yang bertaraf international dan Kawasan Industri Lobam merupakan potensi positif untuk perkembangan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya yang secara tidak langsung akan berhubungan dengan kebutuhan akan tingkat pelayanan kesehatan yang representatif.

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Teluk Sebong, maka kabupaten Bintan secara administrasinya terbagi menjadi 6 (enam) kecamatan yang meliputi kecamatan Bintan Utara, Bintan Timur, Teluk Bintan, Teluk Sebong, Gunung Kijang dan Tambelan.

Tanjung Uban daerah dimana Rumah Sakit ini berada, yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten Bintan yang terletak di kecamatan Bintan Utara yang mencapai luas sebesar 230 km² dan sebagian wilayahnya merupakan kawasan wisata pantai mencapai 112,30 km² dan kawasan industri sebesar 48,05 km². Lahan rumah sakit terletak pada ruas jalan utama yang menghubungkan wilayah Busung dan Tanjung Uban. Penduduk di

Tanjung Uban adalah heterogen dengan jumlah sekitar ± 77.000 jiwa dan sebagian besar mata pencahariannya buruh, pedagang, petani, peternak, perkebunan, pekerja perusahaan, pekerja perhotelan dan pegawai negeri.

Dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan salah satu indikatornya adalah pelayanan kesehatan, maka dengan didirikannya RSJKO Engku Haji Daud di wilayah Tanjung Uban diharapkan dapat berperan dalam pengembangan kesehatan wilayah kecamatan disekitarnya maupun Provinsi Kepulauan Riau secara regional, adapun fokus pelayanan kesehatan rumah sakit ini melayani wilayah kecamatan Tanjung Uban, Teluk Sebong, Teluk sasah, Bintan Utara dan Bintan Timur.

B. Sarana dan Prasarana

Berbicara mengenai rumah sakit umum bertaraf provinsi maka secara tidak langsung akan terkait dengan standar sarana dan prasarana yang harus diadakan yang dalam



hal ini harus mengacu pada peraturan pemerintah tentang rumah sakit yang mempunyai cakupan pelayanan berskala regional atau setara dengan rumah sakit umum kelas B.

Namun perencanaan rumah sakit umum provinsi ini dilakukan secara bertahap baik pada sarana maupun prasarana, dimana pembangunan rumah sakit provinsi ini dilakukan dengan 4 tahap pembangunan, pada tahap awal pembangunannya diharapkan dapat menghasilkan sarana kesehatan yang mampu melayani permasalahan kesehatan masyarakat setara dengan RSU kelas C dengan kelengkapan ruang rawat inap, instalasi gawat darurat dan bedah, pertolongan persalinan, laboratorium 24 jam, radiologi 24 jam dan poliklinik, sedangkan pada tahap akhir pembangunannya mampu menghadirkan suatu kompleks rumah sakit umum berkelas provinsi lengkap dengan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan penunjang baik medik maupun non medik.

Pada tahun ini gedung yang sudah melalui tahap pembangunan adalah gedung tahap I terdiri 2 (dua) lantai, lantai pertama terdapat instalasi gawat darurat (IGD), ruang perawatan, kebidanan, pertolongan persalinan, ruang perinatal, dan ruang direktur terletak

di sayap kanan gedung, pada sayap kiri gedung terdapat instalasi farmasi, apotik 24 jam, ruang manajemen yaitu kantor keuangan perencanaan, kantor pelayanan medik dan instalasi rawat jalan dengan 5 (lima) Poliklinik yaitu klinik umum, klinik penyakit dalam dan klinik gigi, klinik anak dan klinik kebidanan. Sedangkan pada bagian tengah gedung tahap I terdapat ruang bagian pendaftaran, rekam medik, ruang gizi, dan ruang binatu. Lantai dua terdapat 3 (tiga) ruang yang terdiri dari ruang sekretariat rumah sakit, ruang bagian umum dan ruang kepegawaian.

Gedung tahap II terdiri dari 2 (dua) lantai, lantai I terdapat ruang instalasi bedah sentral dan ruang perawatan intensif, lantai dua terdapat ruang laboratorium klinik, ruang radiologi, ruang IPSRS. Dengan kesimpulan keseluruhan gedung tahap II.

Gedung tahap III, dan IV masih dalam proses pengerjaan pembangunan yang direncanakan untuk instalasi rawat inap, ruang penunjang, instalasi pemulasaran jenazah, ruang isolasi, mess pegawai dan komplek perumahan dokter.



RSJKO Engku Haji Daud dilengkapi dengan sarana rumah dinas dan direncanakan akan ditambah dengan asrama paramedis.

C. Visi dan Misi

VISI

Berdasarkan amanat Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan UPTD RSJKO Engku Haji Daud dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, maka visi dan misi RSJKO Engku Haji Daud adalah sebagai berikut:

> Menjadi Rumah Sakit Jiwa Paripurna untuk Rujukan Pelayanan Jiwa, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2026

Visi RSJKO Engku Haji Daud adalah

rehabilitasi ketergantungan obat."

Nilai-nilai (*values*) RSJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau:

e. Menciptakan tim kerja yang solid, berkualitas sehingga menimbulkan pengembangan diri, inisiatif, inovasi dan kreativitas anggotanya.
f. Mengutamakan manajemen mutu terpadu dan manajemen pembiayaan terpadu
g. Mencapai bebas kecelakaan, sehingga unggul dalam keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja.
h. Bangga sebagai pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang selalu peduli terhadap kesehatan.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau disajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas keuangan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam memenuhi tujuan umum tersebut diatas, Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau telah menyusun laporan keuangan tahun 2025 yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Penyajian Laporan Keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggung-jawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai. Dari sisi internal (*internal accountability*), Laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung-jawaban internal yaitu pertanggungjawaban kepala SKPD kepada Kepala Daerah.

Dari sisi pemakai eksternal (*external accountability*), Laporan keuangan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau merupakan bentuk pertanggung-jawaban eksternal yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Pedoman Standar Akuntansi Keuangan
12. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 211.a Tahun 2009 tentang Penerapan Pola Pengelola Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dengan Status Bertahap.
13. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riua No 931 Tahun 2013 Tentang Penerapan Pola Pengelola Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dengan Status Penuh.

1.4 Sistimatika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penulisan catatan atas Laporan Keuangan ini mengacu pada sistematika penulisan laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Serta sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dengan beberapa modifikasi, yaitu dengan format sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Letak Geografis RSJKO Engku Haji Daud
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.4 Sistimatika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Kebijakan Keuangan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

1.1 Entitas Pelaporan

1.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Pelaporan Keuangan

1.3 Basis Pengakuan dan Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Bab IV Rincian Pos-pos Laporan Keuangan

4.1 Penjelasan pos-pos Neraca

4.2 Penjelasan Laporan Operasional

4.3 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

4.4 Penjelasan Laporan Arus Kas

4.5 Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Bab V Penutup

5.1 Lampiran-lampiran

2. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET APBD

2.1 Kebijakan Keuangan

Pengelolaan belanja daerah dan setiap aktivitas pemerintah perlu disajikan secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan di implementasikan sejalan dengan yang diinginkan Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau dalam pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan belanja daerah pada khususnya antara lain:

a. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan atas dasar tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Hal ini terlihat dengan pengalokasian anggaran yang berbasis kinerja dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
b. Kejelasan tentang misi pengelolaan belanja daerah.
c. Penyesuaian kerangka hukum dan administrasi pengelolaan keuangan daerah dengan perubahan peraturan perundangan yang berlaku sehingga tercipta sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah dengan pembangunan daerah.

d. Tersedianya ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan.
e. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional.
f. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan dan akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
g. Pembinaan dan pengawasan, berperannya asosiasi dan anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
h. Pengembangan penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah melalui teknologi informasi untuk menunjang jalannya pemerintah yang terpadu dan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Dalam pengelolaan belanja daerah, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada sasaran yang ingin dicapai oleh Rumah Sakit Umum Prop. Kepri, antara lain :

(1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;

(2) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan indikator penilaian rumah sakit;

(3) Terciptanya koordinasi antar unit pelayanan dan penunjang pelayanan/manajemen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

(4) Terciptanya penyelenggaraan keuangan rumah sakit yang baik dan bersih sebagai upaya pencegahaan KKN di wilayah Pemerintah Prop. Kepri.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan baik langsung maupun tidak langsung kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Realisasi Anggaran

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah, dengan penyesuaian dari laporan aktivitas dan neraca.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Peng

Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan)

Pulau Dompak Tanjungpinang Kode Pos. 29124

Fax/e- Mail@keuangan.go.id Laman : http://kbad.kepriprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA KEUANGAN
TAHUNAN PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

Hari / Tanggal : Senin 26 Januari 2026

Tempat : Kpb Mini Pulau Bayan

Pada hari ini telah dilaksanakan Rekonsiliasi Data Keuangan antara BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan PUSKESMAS DAPIL DINAS KESEHATAN PULAU DAJO dengan hasil sebagai berikut :

A. DATA LRA

NO	URAIAN	SIKEUDES (SPJ)	SIMDA - BLUD	SELISIH	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1	Belanja UPGU LS	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000	0,00	
2	Belanja UPGU TU	0,00	0,00	0,00	
3	Belanja UPGU LS	Rp 113.544.144.122,00	Rp 113.544.144.122,00	Rp 0,00	Nilai Hutang : Rp 1.114.304,00 Pelunasan UPGU s.d. : 31 Desember 2025
4	Belanja UPGU TU	Rp 4.931.533.801,00	Rp 4.931.533.801,00	Rp 0,00	

B. DATA TBP

NO	URAIAN	BRUTO	POTONGAN	NETTO	KETERANGAN
1	Belanja TBP - UPT Puskesmas	Rp 4.931.533.801,00	Rp 1.114.304,00	Rp 4.930.419.497,00	

C. REALISASI BELANJA

No.	URAIAN	PAGU	PENAP UPGU (UPGU/TUP/LS)	BELANJA TBP (UPGU/TUP + LS)	KOREKSI BELANJA	BELANJA SETELAH KOREKSI	SALDO KAS	SPJ UP/TU	KAS YANG LEBIH DISETOR / (KURANG DISETOR)
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)	8=(4-7)	9	10=(8-9)
1	Belanja	146.527.678.328,00	110.544.144.122,00	118.276.283.605,00	1.114.304,00	118.274.279.296,00	328.280.719,00	328.280.719,00	
	JUMLAH	146.527.678.328,00	110.544.144.122,00	118.276.283.605,00	1.114.304,00	118.274.279.296,00	328.280.719,00	328.280.719,00	-

D. SALDO KAS PENGELOLA KEGIATAN

NO		NAMA BANK	NAMA REKENING	NO REKENING	SALDO AKHIR	KETERANGAN
1	Saldo Kas yang harus ada di Rekening Bendahara Pengeluaran	Bank R.I., Kantor Kas Bintan	BENDAHARA PENGELUARAN	1.000.000	0,00	

E. SETORAN KE KASDA - STS

No	NOMOR STS	NOMOR SPJ	TANGGAL DISETOR (sesuai tanggal dibuat STS)	NILAI SETORAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	01 Nomor 0150000 Tgl 31-12-2025 Rp 328.280.719,00		31/12/2025	328.280.719,00	Pengembalian SISA KAS UP/TU Tgl. 31 Desember 2025
			JUMLAH	328.280.719,00	

I. SETORAN KEMBALI PENGEMBALIAN BELANJA

No.	NOMOR SP2D	NOMOR BPBS / TBP	TANGGAL SETOR (sesuai dengan BPBS / BPS)	NILAI SETORAN (Rp)	KETERANGAN
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			JUMLAH	1.514.584.00	

II. PENAMPUNGAN PENGEMBALIAN KE KAS DAERAH TERHADAP BPHTB/PKB/BBNKB/PBJT

No.	JENIS PENERIMAN	URAIAN	TAHUN TERIMA	TANGGAL SETOR (sesuai dengan BPBS / BPS)	NILAI SETORAN (Rp)	KETERANGAN
				JUMLAH		

III. KESIMPULAN

No.	NILAI (Rp)			NILAI (Rp)			NILAI (Rp)			KETERANGAN
	HASIL REKONSILIASI SP2D - LS + TBP (UP/GU/TU) Buku Kas	LRA Realisasi Belanja Daerah	SELISIH	HASIL REKONSILIASI Jumlah SP2D Belanja	(-) ADMINISTRATIF Jumlah SP2D LS + UP/GU/TU	SELISIH	HASIL REKONSILIASI Saldo Kas Bendahara	BKU Bendahara	SELISIH	
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]

RUMAH SAKIT JIWA & KETERGANTUNGAN OBAT PROVINSI RIAU
DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Bendahara Pengeluaran

BENNY FEBRIYANTO, SE
NIP. 19840225 200904 1 006

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pelaksana Rekonsiliasi

SANGGAR VALENTINO
NI PPPK 19940105202321 1004

Mengetahui,
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Dr. YUDI MARYADI, S.E., M.A.P
NIP. 19810815 200004 1 001

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

RSUKO ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
ALIRAN KAS TA 2026

Per tanggal : 09 Januari 2026

NO	URAIAN		NILAI (Rp.)
1	Anggaran dalam DPA TA 2026 (APBD)		[redacted]
2	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
	1) Uang Persediaan (UP)	[redacted]	
	2) Tambahan Uang (TU)	[redacted]	
	3) Ganti Uang (GU)	[redacted]	
	4) Langsung (LS)	[redacted]	
	Jumlah SP2D		119.544.644.322,00
3	Sisa Dana (1 – 2)		3,145,636,754,00
4	Surat Pertanggungjawaban (SPJ)		
	1) Ganti Uang (SPJ GU/ TBP UP)	[redacted]	
	2) Tambahan Uang (SPJ TU / TBP TU)	[redacted]	
	3) Langsung (LS)	[redacted]	
	Jumlah SPJ		116,218,299,808,00
5	Koreksi Belanja		1.014.304,00
	Jumlah SPJ Penyesuaian		110,214,279,269,00
6	Sisa Anggaran / SILPA =(1-4)		3,475,001,777,00
7	UYHD (2-4)		330,385,023,00
8	Setoran Sisa UP/GU dan TU s.d 31 Desember 2025		
	1). STS UP/GU	[redacted]	
	2). STS TU	[redacted]	
	3). Setoran Kelebihan Belanja	[redacted]	
	Jumlah setoran STS UP , STS TU, dan Setoran Pengembalian Belanja s/d 31/12/2025		330,385,023,00
9	Sisa UYHD yang masih harus disetor (6-7)		-
10	Pungutan Pajak	[redacted]	
	Setoran Pajak	[redacted]	
	Saldo Pajak yang belum disetor		-
11	Pengeluaran yang belum di SPJ kan		-
12	Saldo Buku Kas per 31/12/2025= (9+10+11)		-
13	Pengeluran TMT tanggal 01/01/2026 s/d tanggal	09 Januari 2026	
	-Setoran Sisa UP dan TU	[redacted]	
	-Setoran pajak	[redacted]	
	Jumlah pengeluaran tmt tgl 01/01/2026 s.d Tgl	09 Januari 2026	-
14	Saldo Buku Kas per tgl : 09 Januari 2026	=(12-13)	-
15	Saldo Kas per tgl : 09 Januari 2026		
	1) Uang Tunai	[redacted]	
	2) Saldo Bank/Rekening Koran	[redacted]	
	3) SPBE dan Alat Pembayaran lainnya	[redacted]	
	Jumlah Fisik Kas		-
16	Selisih lebih /(kurang) kas =(12-15)		-

Catatan :

Mengetahui
Bendahara Pengeluaran

RSUD ENGKU HAJI DAUD

BENNY TEDJOKANTO, S.E.
NIP 196402282006041006

Tim Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,

1 BAMBANG SUNDORO, S.E., M.Ak
NIP 197810242008011012

2 MARHANI, S.Pd
NIP 196806052014032008

3 ZETRA OKTARIANI, S.ST, M.PA
NIP 198410182011012001

RSUKD Ekseku HALU OLEO

KKP Penarikan Mutasi Belan Kas tanggal TA 2025

No	Uraian	Menurut Auditor	Menurut SKPD	Selisih
I	Jumlah Penerimaan Buku Kas			
1	Penerimaan SP2D	119.844.844.322		
2	Pungutan Pajak	6.633.231.235		
3	Mutasi Penerimaan Buku Pembantu Simpanan Bank			
4	Dikurangi Pungutan Pajak Non Tunai			
5	Dikurangi Jumlah SPJ Non Tunai			
	Jumlah	119.844.844.322		
	Selisih		-	
II	Jumlah Pengeluaran Buku Kas			
1	SPJ definitif / saldo LRA	119.214.279.299		
2	Pengeluaran belum definitif (SPM TU yang belum keluar SP2D TU Nihilnya)	-		
3	Setoran Pajak	6.633.231.235		
4	Setoran SISTU dan UP	290.365.023		
5	Mutasi Pengeluaran Buku Pembantu Simpanan Bank			
6	Dikurangi Setoran Pajak Non Tunai			
7	Dikurangi Jumlah SPJ Non Tunai			
	Jumlah Pengeluaran Kas	119.844.844.322		
III	Saldo BKU	-	-	-

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari Selasa, tanggal 06 Januari 2026 , yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

1. Nama : BAMBANG SAMBODO, SE.,M.Ak
   NIP. : 197210242006041012
   Jabatan : Pengendali Teknis
2. Nama : MARNANI, S.Pd
   NIP. : 196903052015032005
   Jabatan : Ketua
3. Nama : ZETRA OKTAFIANDRI, S.St., M.PA.
   NIP. : 199410192015031001
   Jabatan : Anggota

Sesuai dengan Surat Tugas (ST) Inspektur Daerah Provinsi Kep. Riau Nomor 3.03/ST/INSPROVDK-DB/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 setelah mempelajari surat bukti-nya, kami melakukan pemeriksaan tempat pada RSUKD ENGKU HAJI DAUD Provinsi Kepulauan Riau,

Nama : BENNY FEBRIYANTO, S.E.
NIP : 198402252008041005
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Yang dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 14 TAHUN 2025 ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran pada RSUKD ENGKU HAJI DAUD Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan / pengelolaan ini, ditemukan sebagai berikut:

Jumlah Uang yang Kami Hitung dihadapan Pejabat tersebut adalah :

a. Uang kertas dan uang logam	Rp	-
b. BPMU (SPM) dan Alat Pembayaran lainnya	Rp	-
c. Saldo Bank Riau Kepri (No Rek ; .....)	Rp	-
d. Saldo Bank Bukopin (No Rek : .....)	Rp	-
e. Surat-surat Berharga yang ditimkan	Rp	-
Jumlah (Saldo Kas)	Rp	-

Buku Kas Umum :

a. Jumlah Penerimaan s/d 31 Desember 2025	Rp	119.544.944.322,00
b. Jumlah Pengeluaran s/d 31 Desember 2025	Rp	119.544.944.322,00
Saldo uang menurut BKU per 31 Desember 2025	Rp	-
Pengeluaran 1 Januari 2026 s.d tgl 06 Januari 2026	Rp	-
Saldo uang menurut BKU per 06 Januari 2026	Rp	-

Selisih kurang / lebih antara saldo kas dan buku
Perbedaan Positif / Negatif yaitu : -

Bendahara Pengeluaran
RSUKD ENGKU HAJI DAUD
BENNY FEBRIYANTO, S.E.
NIP. 198402252008041005

Tim Pemeriksa

1. BAMBANG SAMBODO, S.E.,M.Ak
   NIP 197210242006041012
2. MARNANI, S.Pd
   NIP 196903052015032005
3. ZETRA OKTAFIANDRI, S.St.,M.PA.
   NIP 199410192015031001

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS TA 2025
RSUKO ENGKU HAJI DAUD

REGISTER PENUTUPAN KAS

Penutupan Kas	:	31 Desember 2025	
Nama Bendahara Pengeluaran	:	BENNY FEBRIYANTO, S.E.	
Tanggal Penutupan Kas Lalu	:	31 Desember 2024	
Jumlah Penerimaan	:	s/d 31 Desember 2025	Rp. 119,544,644,322.00
Jumlah Pengeluaran	:	s/d 31 Desember 2025	Rp. 119,544,644,322.01
		Saldo uang menurut Buku per 31-12-2025	Rp. -
		Selisih 01/01/2026 s/d 06/01/2026	Rp. -
		Saldo Buku per tanggal 06/01/2026	Rp. -
		Saldo Kas per tanggal 06/01/2026	Rp. -

Uang Kertas Nilai	Rp.	100.000	x	-	Lembar	=	Rp. -
Uang Kertas Nilai	Rp.	50.000	x	-	Lembar	=	Rp. -
Uang Kertas Nilai	Rp.	20.000	x	-	Lembar	=	Rp. -
Uang Kertas Nilai	Rp.	10.000	x	-	Lembar	=	Rp. -
Uang Kertas Nilai	Rp.	5.000	x	-	Lembar	=	Rp. -
Uang Kertas Nilai	Rp.	2.000	x	-	Lembar	=	Rp. -
Uang Kertas Nilai	Rp.	1.000	x	-	Lembar	=	Rp. -
Uang Kertas Nilai	Rp.	500	x	-	Lembar	=	Rp. -
Uang Logam Nilai	Rp.	1.000	x	-	Keping	=	Rp. -
Uang Logam Nilai	Rp.	500	x	-	Keping	=	Rp. -
Uang Logam Nilai	Rp.	200	x	-	Keping	=	Rp. -
Uang Logam Nilai	Rp.	100	x	-	Keping	=	Rp. -
Uang Logam Nilai	Rp.	50	x	-	Keping	=	Rp. -
Uang Logam Nilai	Rp.	-	x	-	Keping	=	Rp. -

Jumlah Uang Tunai (Uang Kertas / Uang Logam) Rp. -

Kertas Berharga dan Bagian Kas yang dikirkan
Uang Tunai Rp. -
Saldo Bank Rp. -
Total Kas Rp. -
Selisih kurang/ lebih antara Saldo Kas dan Saldo Buku Rp. -
Perbedaan positif / negatif yaitu : -

Keterangan : -

Tim Pemeriksa
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau,

1. BAMBANG BAMBANG, SP,MAP
   NIP 197810242006041012 :
2. MARYANI, S.Pd
   NIP 198805032010012009 :
3. ZESTA OKTAVIANDRI, S.Si, MPA.
   NIP 160410192018031001 :

Pengelola Barang Pengelolaan
RSUKO ENGKU HAJI DAUD

BENNY FEBRIYANTO, S.E.
NIP. 198902262008041009

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Sandar dan Kota Piring
Kompleks Perkantoran Gubernur Muhammad Rizayat Syafei Gedung Raja Ali (Marhaen Pelan Sayan)
Pulau Dompak Ibu Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos : 29124
E-mail : bkad@kepriprov.go.id Website : https://bkad.kepriprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA KEUANGAN
PERIODE 1 OKTOBER S.D 31 OKTOBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

Hari / Tanggal :
Tempat :

Telah dilakukan Rekonsiliasi Data Keuangan antara BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan RUMAH SAKIT JIWA KETERGANTUNGAN OBAT KHUSUS PADA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, dengan hasil sebagai berikut :

I. DATA SALDO PENDAPATAN PENERIMAAN

No.	URAIAN	SIMDA		SELISIH	SIMDA			KETERANGAN
		Saldo Pendapatan	SIPD		Realisasi Pendapatan	Penerimaan Kas	Selisih	
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan di Bawah Milik Unsur Daerah	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Terdapat Selisih Saldo Pendapatan yang terdiri Tanggal 1 Oktober 2025 Sebesar Rp 1.027.463,00 dengan Saldo Pendapatan yang terjadi Tanggal 2 Oktober 2025 Sebesar Rp 1.028.490,00
	Total Pendapatan BLUD				[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Catatan : Pendapatan Ke Kas Bendahara Pengeluaran (LS/GU Pada tanggal 1 Okt 2025 Sebesar Rp.1.077.310.000,00- Pada tanggal 30 Oktober 2025 Sebesar Rp0.957.317,00-

II. DATA SALDO REKENING KHUSUS PENAMPUNG PENDAPATAN BLUD

NO	URAIAN	NAMA BANK	NAMA REKENING	NO REKENING	SALDO AKHIR
1	Saldo Rekening Koran Untuk Periode 31 Oktober 2025	BANK BSI	REKENING PENGELUARAN BLUD	7000074897	[illegible]
2	Saldo Rekening Koran Untuk Periode 31 Oktober 2025	BANK RIAU KEPRI SYARIAH	REKENING PENGELUARAN BLUD	9460103234	[illegible]

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pelaksana Rekonsiliasi

JANUAR VALENTINO
NIP PPPK. [illegible]

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DR. [illegible]

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Kantor Gubernur Sri Kota Pinang
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Cenggang Raja Ali Kelana Pulau Dompak
Pulau Dompak Sri Darat Kecamatan Tanjungpinang Kota Pos : 29134
Email : kbadanpengelolakeuangan@gmail.com Website : https://bkad.kepriprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA KEUANGAN
PERIODE 1 NOVEMBER S.D 10 NOVEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

Hari Tanggal :
Tempat :

Telah dilaksanakan Rekonsiliasi Data Keuangan antara BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan KANTOR DINAS JASA KEUANGAN Provinsi GRAT DAERAH HAJI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, dengan hasil sebagai berikut :

A. DATA SALDO KEUANGAN PENGELOLA KAS

NO	URAIAN	DEBET		KREDIT			KETERANGAN
		Saldo Awal/Lalu	Debet	Kredit	Saldo Terakhir	Saldo Awal	Selisih
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Jumlah						

Catatan : Pemerintah Kab/Kota/Unit Pengelola BLUD Hutang Sampai 3 November 2025 Sebesar Rp. [illegible] Pada periode 4 November 2025 Sebesar Rp. [illegible]

B. DATA SALDO PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN PENGEMBANGAN BLUD

NO	URAIAN	NAMA BANK	NAMA PEKERJAAN	NO REKENING	SALDO AKHIR
1	Saldo Rekening Awal Bank Periode 03 November 2025	BANK BRI	REKENING PENGELOLAAN BLUD	[illegible]	[illegible]
2	Saldo Rekening Akhir Bank Periode 03 November 2025	BANK RIAU KEPRI SYARIAH	REKENING PENGELOLAAN BLUD	[illegible]	[illegible]

[illegible]

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

[illegible]

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Sekitar Sport Kota Tanjung
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan)
Pulau Bernyah Sori Darat Bintan – Tanjungpinang Kode Pos : 29134
E-mail : bkad.sp1.kepulauanriau@gmail.com Website : http://bkad.kepriprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA KEUANGAN
PERIODE 1 DESEMBER S.D 31 DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-12-2025) bertempat di Ruang Rapat Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. [illegible] selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau
2. [illegible] selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Telah melakukan Rekonsiliasi Data Keuangan antara BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU, dengan hasil sebagai berikut :

A. DATA KAS BERDASARKAN PENDAPATAN

No	Uraian	Menurut			Menurut			Keterangan
		Tanggal Pembukuan	Debet	Kredit	Saldo Pembukuan	Saldo Rekening Koran	Selisih	
1	Pendapatan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pendapatan Asuransi - Saldo Pembukuan yang sesuai, Tanggal 31 Desember 2025 Sebesar Rp [illegible] Saldo Pembukuan yang belum, Tanggal 2 Januari 2026 Sebesar Rp [illegible]
	Total Pendapatan [illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Keterangan : Pendapatan Kas Kota Bendahara Pengeluaran BLUD Pada tanggal 8 Desember 2025 Sebesar Rp [illegible] ; Pada tanggal 4 Desember 2025 Sebesar Rp [illegible] ; Pada tanggal 17 Desember 2025 Sebesar Rp [illegible] ; Pada tanggal 23 Desember 2025 Sebesar Rp [illegible] ; Pada tanggal 30 Desember 2025 Sebesar Rp [illegible] ; Pada tanggal 31 Desember 2025 Sebesar Rp [illegible]

B. DATA SALDO PENGENDAPAN KONDISI REKENING PENERIMAAN BLUD

NO	URAIAN	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REK	NO REKENING	SALDO AKHIR
1	Saldo Rekening Koran Bank Periode 31 Desember 2025	BANK BRI	RSJKD ENGKU HAJI DAUD	[illegible]	[illegible]
2	Saldo Rekening Koran Bank Periode 31 Desember 2025	BANK BRI KEPRI BATAMAN	RSJKD ENGKU PENERIMAAN BLUD	[illegible]	[illegible]

RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pelaksana Bidang Aset,

[illegible]
NIP. [illegible]

KEPULAUAN RIAU

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan)
Pulau Dompak Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos : 29124
E-mail : bkadkeprisekretariat@gmail.com Website : https://bkad.kepriprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA KEUANGAN
TRIWULAN IV 1 OKTOBER S.D 31 DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

Hari / Tanggal :
Tempat :

Telah dilakukan Rekonsiliasi Data Keuangan antara BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU, dengan hasil sebagai berikut :

A. DATA KAS BENDAHARA PENERIMAAN

NO.	URAIAN	JUMLAH			KETERANGAN
		Rekap Pendapatan	Rekening Koran	Selisih	
1	2	3	4	5	6
1.	Retribusi Daerah - Retribusi Jasa Umum - Retribusi Pelayanan Kesehatan - Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.	1.565.148.661,00	1.565.169.119,00	21.058,00	Transaksi Selisih Dalam Perjalanan yang belum Tanggal 1 Oktober 2025 Sebesar Rp 1.827.665,00- selisih Dalam Perjalanan yang belum Tanggal 3 November 2025 Sebesar Rp 1.806.607,00-
2.	Retribusi Daerah- Retribusi Jasa Umum - Retribusi Pelayanan Kesehatan - Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	311.303.431,00	309.006.060,00	2.326.967,00	Transaksi Selisih Dalam Perjalanan yang belum Tanggal 3 November 2025 Sebesar Rp 1.809.060,00- selisih Dalam Perjalanan yang belum Tanggal 31 Desember 2025 Sebesar Rp 4.133.576,00-
3.	Retribusi Daerah- Retribusi Jasa Umum - Retribusi Pelayanan Kesehatan - Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	3.166.716.471,00	3.169.426.106,00	2.687.635,00	selisih Dalam Perjalanan yang belum Tanggal 2 Januari 2026 Sebesar Rp 1.413.939,-
	Total Pendapatan BLUD (1+2+3)	5.043.168.562,00	5.043.601.285,00	382.724,00	

Catatan : Penyetoran Ke Kas Bendahara Pengeluaran BLUD Pada tanggal 1 Oktober 2025 Sebesar Rp 1.177.313.858,00, Pada tanggal 03 Oktober 2025 Sebesar Rp 8.957.217,00- Catatan : Penyetoran Ke Kas Bendahara Pengeluaran BLUD Pada tanggal 3 November 2025 Sebesar Rp 1.438.141.546,00 Pada tanggal 4 November 2025 Sebesar Rp 137.009.519,00- Penyetoran Ke Kas Bendahara Pengeluaran BLUD Pada tanggal 31 Desember 2025 Sebesar Rp 124.600.200,- Pada tanggal 4 Desember 2025 Sebesar Rp 1.841.124.861,- Pada tanggal 17 Desember 2025 Sebesar Rp 194.350.471,- Pada tanggal 23 Desember 2025 Sebesar Rp 332.206.882,- Pada tanggal 30 Desember 2025 Sebesar Rp 1.236.836.080,- Pada tanggal 31 Desember 2025 Sebesar Rp 60.137.388,- tanggal 31 Desember 2025 Sebesar Rp 7.269.938,-

B. DATA SALDO REKENING KORAN BENDAHARA PENERIMAAN BLUD

NO	URAIAN	NAMA BANK	NAMA REKENING	NO REKENING	SALDO AKHIR
1	Saldo Rekening Koran Bank Periode 1 Oktober s.d 31 Desember 2025	BANK BDI	RSJKO BHD BIDUK HAJI BLUD	7050010501	0,00
2	Saldo Rekening Koran Bank Periode 1 Oktober s.d 31 Desember 2025	BANK RIAU KEPRI SYARIAH	RSJKO BHD PENERIMAAN BLUD	1450101224	0,00

RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT PROVINSI HAJI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Bendahara Penerimaan BLUD,

dr. NAMA LENGKAP, MKM
NIP. 19821223 200801 2 001

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pelaksana Rekonsiliasi,

JANUAR VALENTINO
NI PPPK. 19940105202211001

MENGETAHUI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Analis Kebijakan Pelaksana Pengelola Aset Daerah Ahli Muda

Dr. Nama Lengkap, S.E., M.A.P
NIP. 19[illegible]

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Sandar Soal Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Merbaun Pulau Bayan)
Pulau Dompak Sei Darat Malaur – Tanjungpinang Kode Pos : 29124
E-mail : bkadkeupri.sekretariat@gmail.com Website : https://bkad.kepriprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA KEUANGAN, SEMESTER II 1 JULI S/D 31 DESEMBER 2025 TAHUN ANGGARAN 2026

Hari / Tanggal :
Tempat :

Telah dilakukan Rekonsiliasi Data Keuangan antara BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU, dengan hasil sebagai berikut :

1. DATA KAS BENDAHARA PENERIMAAN

NO.	URAIAN	JUMLAH			KETERANGAN
		Saldo Pembukuan	Saldo Kas	Selisih	
1	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau	3.647.130.413,00	3.647.391.413,00	261.000,00	
2	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau	132.611.512,00	132.671.478,00	59.966,00	
3	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau	2.004.200.044,00	2.007.340.044,00	3.140.000,00	
4	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau	1.965.349.361,00	1.965.380.361,00	31.000,00	
5	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau	211.331.038,00	199.996.971,00	(11.334.067,00)	
6	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau	3.156.736.471,00	3.159.424.104,00	2.687.633,00	
	Total Penyetoran BLUD (1 s/d 6)	11.317.460.039,00	11.312.815.139,00	266.724,00	

Catatan : Penyetoran Ke Kas Bendahara Pengeluaran BLUD Pada tanggal 15 Juli 2025 Sebesar Rp.1.00.000.0 ,- Pada tanggal 21 Juli Sebesar Rp 450.347.875 ,- Penyetoran Ke Kas Bendahara Pengeluaran BLUD Pada tanggal 1 Agustus 2025 Sebesar Rp.704.779.167,00 Pada tanggal 4 Agustus 2025 Sebesar Rp 1.517.452.658,00 ,- Penyetoran Ke Kas Bendahara Pengeluaran BLUD Pada tanggal 2 Sept 2025 Sebesar Rp. Rp 1.908.054.504,00 Pada tanggal 8 Sept 2025 Sebesar Rp. Rp 82.317.622,00 Pada Tanggal 24 Sept 2025 Sebesar Rp. Rp 93.821.961,00 ,- Pada Tanggal 24 Sept 2025 Sebesar Rp. Rp 158.147.236,00 Penyetoran Ke Kas Bendahara Pengeluaran BLUD Pada tanggal 1 Okt 2025 Sebesar Rp 1.771.303.464,00 ,- Pada tanggal 10 Oktober 2025 Sebesar Rp.6.857.217,00 Catatan : Penyetoran Ke Kas Bendahara Pengeluaran BLUD Pada tanggal 3 November 2025 Sebesar Rp.1.428.141.545,00 Pada tanggal 4 November 2025 Sebesar Rp.42.000.000,00 ,- Pada tanggal 10 Desember 2025 Sebesar Rp.174.500.208,- Pada tanggal 15 Desember 2025 Sebesar Rp.641.124.591,- Pada tanggal 17 Desember 2025 Sebesar Rp.194.130.271,- Pada tanggal 23 Desember 2025 Sebesar Rp.202.200.982,- Pada tanggal 24 Desember 2025 Sebesar Rp.2.139.939.096,- Pada tanggal 30 Desember 2025 Sebesar Rp.90.137.365,- pada tgl 31 Desember 2025 Sebesar Rp.7.269.900,-

6. DATA SALDO REKENING KORAN BENDAHARA PENERIMAAN BLUD

NO	URAIAN	NAMA BANK	NAMA REKENING	NO REKENING	SALDO AKHIR
1	Saldo Rekening Koran Bank Periode 1 Juli s.d 31Desember 2025	BANK BSI	REKNO BHD ENGKU HAJI DAUD	7030074837	0,00
2	Saldo Rekening Koran Bank Periode 1 Juli s.d 31Desember 2025	BANK RIAU KEPRI SYARIAH	REKNO BHD PENERIMAAN BLUD	1480101234	0,00

KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI DAN KEBENCANAAN GEOLOGI ENGKU HAJI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Bendahara Penerimaan BLUD

ADMINISTRATOR, S.Kom
NIP. 198812132015062001

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pelaksana Rekonsiliasi

JERRYAR VALENTINO,
NI PPPK. 198401052025211021

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Analis Hubungan Pelaksana Dan Evaluasi Anggaran

[redacted]
NIP. [redacted]

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Dandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali Haji(Hem Pulau Bayan)
Pulau Dompak Seri Dataf Makmur – Tanjungpinang Kode Pos : 29124
E-mail : bkad.bpd.sekretariat@gmail.com Website : https://bkad.kepriprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA KEUANGAN
TAHUNAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2026

Hari / Tanggal :
Tempat :

Telah dilakukan Rekonsiliasi Data Keuangan antara BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU, dengan hasil sebagai berikut :

A. DATA KAS BENDAHARA PENERIMAAN

NO	TRANSAKSI	JUMLAH			KETERANGAN
		Saldo Menurut BKAD	Saldo Menurut BLUD	Selisih	
1	Kas/Bank Daerah - Simpanan Dan Uang - Bendahara Penerima Kendaraan - Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	20,722,884,442.00	20,708,440,523.00	(14,443,919.00)	selisih Belum Penjaluran yang masuk, Sampai 2 Januari 2026 Sebesar Rp 14,443,919,-
	Total Pendapatan BLUD (1+2+3)	20,722,884,442.00	20,708,440,523.00	(14,443,919.00)	

B. DATA SALDO REKENING KORAN BENDAHARA PENERIMAAN BLUD

NO	UPDATE	NAMA BANK	NAMA REKENING	NO REKENING	SALDO AKHIR
1	Saldo Rekening Koran Bank Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025	BANK BSI	RSJKO EHD ENGKU HAJI DAUD	7030974507	0,00
2	Saldo Rekening Koran Bank Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025	BANK RIAU KEPRI SYARIAH	RSJKO EHD PENERIMAAN BLUD	1450161234	0,00

CATATAN : Uang Tunai di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 14,443,919,-

RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Bendahara Penerimaan BLUD,

NIP.

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pelaksana Rekonsiliasi,

JONTAR VALENTINO
NIP.PPPK. 199401262025211021

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah,

NIP.

PIUTANG RSUD ENGKU HAJI DAUD

31 DESEMBER 2025

NO	NAMA PIHAK KE-3	TOTAL PIUTANG 2024	PELUNASAN	ADM	Sisa Piutang 2024	Piutang 2025	Total Piutang	< 1 Thn (-2025)	1-2 Thn (-24-25) 5%	3-5 Thn (-20-18) 10%	6 Thn (-2019)100%	Total Penyisihan
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]				[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]				[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]				[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]				[illegible]	[illegible]
8	PERTAMINA	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
9	TASPEN	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]			
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
11	KWEDA	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
13	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
14	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
Total		133.469.753,00	101.565.812,00	99.000,00	31.705.741,00	131.374.676,00	139.720.337,00	558.873,19	56.877,19	-	37.365.000,00	37.980.945,44

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
INSPEKTORAT PROVINSI

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN BENDAHARA PENERIMAAN BLUD

NAMA SKPD : RSJKD ENGKU HAJI DAUD (PENERIMAAN BLUD)
ALIRAN KEUANGAN
PERIODE TAHUN 2025, PER 05 JANUARI 2026

NO.	URAIAN	NILAI (Rp.)	
1	2	3	4
1	Saldo kas per 2 Januari 2025		3,328,240.00
2	Penerimaan BLUD (Rek. Bendahara Penerimaan) 1 Jan 2025 s/d 31 Desember 2025		
	1) Januari	2,400,101,993.00	
	2) Februari	1,991,939,498.00	
	3) Maret	993,999,818.00	
	4) April	1,559,454,968.00	
	5) Mei	1,749,299,407.00	
	6) Juni	1,708,708,788.00	
	7) Juli	3,047,833,411.00	
	8) Agustus	492,615,822.00	
	9) September	2,455,396,564.00	
	10) Oktober	1,955,149,081.00	
	11) November	391,733,650.00	
	12) Desember	3,195,735,471.00	
	Jumlah saldo (bertambah penerimaan)		20,752,595,472.00
3	Setoran via Rek. BSI (7030374937) / Penerimaan Dan BRK (1460101234) ke Bendahara Pengeluaran BLUD per 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025		
	1) Januari	3,258,240.00	
	2) Februari	2,000,791,693.00	
	3) Maret	1,491,824,498.00	
	4) April	1,718,295,794.00	
	5) Mei	1,749,537,144.00	
	6) Juni	1,700,968,859.00	
	7) Juli	2,016,040,938.00	
	8) Agustus	1,822,225,834.00	
	9) September	1,955,101,537.00	
	10) Oktober	1,957,171,913.00	
	11) November	1,955,148,031.00	
	12) Desember	3,470,029,982.00	
	Jumlah Total setoran dari Rek. BSI (7030374937) / Penerimaan Dan BRK (1460101234) ke Rek. SP-LS (Bendahara Pengeluaran)		20,764,708,792.00
	Saldo BKU Bendahara Penerimaan BLUD per 31 Desember 2025		7,441,339.00
	Penerimaan BLUD (Rek. Bendahara Penerimaan) 1 Jan 2026 s/d 05 Januari 2026		7,441,728.00
	Setoran via Rek. BSI (7030374937) / Penerimaan Dan BRK (1460101234) ke Bendahara Pengeluaran (LS-LS) per 1 Januari 2026 s/d 05 Januari 2026		
	Saldo BKU Bendahara Penerimaan BLUD per 05 Januari 2026		
	Saldo Kas Bendahara Penerimaan per 05 Januari 2026		
	1). Uang Tunai	-	
	2). Saldo Rek. BSI (7030374937) / (Penerimaan)	379,049.00	
	3). Saldo Rek. BRK (1460101234) / (Penerimaan)	7,062,779.00	
	Jumlah Kas		7,441,728.00

-4	Setelah lebih kurang lalu		
	Diskusi oleh ...		

Mengetahui,
Bendahara Penerimaan RSUKD,

Tim Inspektorat
Provinsi Kepulauan Riau,

1. ..... :
2. ..... :
3. ..... :

Lampiran 1

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
INSPEKTORAT PROVINSI

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS TA 2025
Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud

REGISTER PENUTUPAN KAS

Penutupan Kas	:	08 Januari 2026		
Nama Bendahara Penerimaan	:	GEMI NASTITI		
Tanggal Penutupan Kas Lalu	:	-		
Saldo Awal	:	2 Januari 2025	Rp.	3.258.249,00
Jumlah Penerimaan 2025	:	01 Januari s/d 31 Desember 2025	Rp.	20.782.890.472,00
Jumlah Pengeluaran 2025	:	01 Januari s/d 31 Desember 2025	Rp.	20.784.708.782,00
Saldo Kas 31 Desember 2025	:	Per 31 Desember 2025	Rp.	1.446.939,00
Jumlah Penerimaan 2026	:	01 Januari s/d 08 Januari 2026	Rp.	7.441.725,00
Jumlah Pengeluaran 2026	:	01 Januari s/d 08 Januari 2026	Rp.	1.446.939,00
Saldo Kas 08 Januari 2026	:	Per 08 Januari 2026	Rp.	7.441.725,00

Uang Kertas Nilai	Rp.	100.000	x	Lembar	=	Rp.	0,00
Uang Kertas Nilai	Rp.	50.000	x	Lembar	=	Rp.	0,00
Uang Kertas Nilai	Rp.	20.000	x	Lembar	=	Rp.	0,00
Uang Kertas Nilai	Rp.	10.000	x	Lembar	=	Rp.	0,00
Uang Kertas Nilai	Rp.	5.000	x	Lembar	=	Rp.	0,00
Uang Kertas Nilai	Rp.	2.000	x	Lembar	=	Rp.	0,00
Uang Kertas Nilai	Rp.	1.000	x	Lembar	=	Rp.	0,00
Uang Kertas Nilai	Rp.	500	x	Lembar	=	Rp.	0,00
Uang Logam Nilai	Rp.	1.000	x	Keping	=	Rp.	0,00
Uang Logam Nilai	Rp.	500	x	Keping	=	Rp.	0,00
Uang Logam Nilai	Rp.	200	x	Keping	=	Rp.	0,00
Uang Logam Nilai	Rp.	100	x	Keping	=	Rp.	0,00
Uang Logam Nilai	Rp.	50	x	Keping	=	Rp.	0,00
Uang Logam Nilai	Rp.	25	x	Keping	=	Rp.	0,00
Jumlah Uang Tunai (Uang Kertas / Uang Logam)						Rp.	0,00

Kertas Berharga dan Bagian Kas yang disetorkan

Uang Tunai	Rp.	0,00
Saldo Bank	Rp.	7.441.725,00
Total Kas	Rp.	7.441.725,00
Selisih (kurang) / lebih antara Saldo Kas dan Saldo Buku	Rp.	0,00

Perbedaan positif / negatif yaitu : Rp 0,00
Keterangan : -

Tim Pemeriksa
Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau,

SAMBANG SAMBOCO, S.E., M.Ak
NIP 197510242006041012

MARNANI, S.Pd
NIP 196903052016032005

ZETRA OKTAFIANDRI, S.Si, M.PA
NIP 198410182016031001

Bendahara Penerimaan
Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud

GEMI NASTITI
NIP. 19821223 200903 2001

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
BENDAHARA PENERIMAAN

Pada hari ini, Selasa tanggal 06 Januari 2026 , yang bertanda tangan di bawah ini kami:

1. Nama : Bambang Bambodo, S.E., M.Ak.
   Jabatan : Pengendali Teknis
2. Nama : Ekamrul, S.Pd.
   Jabatan : Ketua Tim
3. Nama : Zulva Oktaffandri, S.Si., M.P.A.
   Jabatan : Anggota Tim

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 3.000/KEP/PEMPROV/DKUM/2026 tanggal 05 Januari 2026 telah melaksanakan pemeriksaan kas di tempat kerja :

melakukan pemeriksaan terhadap pada : RSUKD ENGKU HAJI DAUD TANJUNG UBAN Provinsi Kepulauan Riau

Nama	:	Sarul Nasrul
NIP	:	19[illegible]20 2 001
Jabatan	:	Bendahara Penerimaan BLUD

Yang sesuai Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2025 ditugaskan sebagai Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUKD ENGKU HAJI DAUD TANJUNG UBAN

Setelah diadakan hasil pemeriksaan kas serta bukti- bukti yang terkait dalam pengurusan / pengelolaan Uang, dikemukakan sebagai berikut :

Jumlah Uang yang harus dipertanggungjawabkan Pejabat tersebut adalah :

a. Uang kertas dan uang logam	Rp	-
b. SPMU (SPM) dan Alat Pembayaran lainnya	Rp	-
c. Saldo Bank [illegible]	Rp	235.648,00
d. Saldo Kas [illegible]	Rp	7.084.778,00
Jumlah (Saldo Kas) per 06 Januari 2026	Rp	7.441.726,00

Tim Pemeriksa

1. BAMBANG BAMBODO, S.E., M.Ak
   NIP 19761004 200604 1 012 ..... 1. .....
2. EKAMRUL, S.Pd
   NIP 19800306 201 [illegible] 2 009 ..... 2. .....
3. ZULVA OKTAFIANDRI, S.Si, M.P.A
   NIP 19841026 201403 2 001 ..... 3. .....

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RSKO ENGKU HAJI DAUD
BUKU RIKAPAN PENERIMAAAN

BULAN JANUARI - DESEMBER 2025

NO URUT	PELAYANAN KESEHATAN						PENDAPATAN KERJASAMA	LAIN-LAIN	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL PENYETORAN KE BLUD	SISA SALDO DI REKENING PENERIMAAN
	BULAN	PASIEN UMUM		BPJS	JAMINAN						
		TUNAI	NON TUNAI								
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	JANUARI	Rp 341.438.609,00	Rp 95.755.785,00	Rp 1.628.224.131,00	Rp 33.053.456,00	Rp	-	Rp 2.280.000,00	Rp 2.100.751.983,00	Rp 3.258.249,00	Rp 2.100.751.983,00
2	FEBRUARI	Rp 90.279.431,00	Rp 15.621.175,00	Rp 1.535.111.776,00	Rp 22.767.998,00	Rp	38.108.108,00	Rp 80.000,00	Rp 1.491.988.488,00	Rp 2.100.751.983,00	Rp 1.491.988.488,00
3	MARET	Rp 51.666.967,00	Rp 47.892.119,00	Rp 514.758.608,00	Rp 41.258.421,00	Rp	-	Rp 5.920.150,00	Rp 663.999.849,00	Rp 1.691.988.488,00	Rp 663.999.849,00
4	APRIL	Rp 51.696.016,00	Rp 18.785.639,00	Rp 1.460.239.727,00	Rp 38.998.546,00	Rp	-	Rp 8.860.000,00	Rp 1.588.484.968,00	Rp 1.718.295.194,00	Rp 534.189.623,00
5	MEI	Rp 100.318.140,00	Rp 29.630.253,00	Rp 1.590.032.217,00	Rp 68.398.785,00	Rp	-	Rp 920.000,00	Rp 1.789.299.407,00	Rp 1.749.057.144,00	Rp 574.151.886,00
6	JUNI	Rp 70.924.509,00	Rp 23.621.742,00	Rp 1.356.343.817,00	Rp 52.295.000,00	Rp	-	Rp 5.523.000,00	Rp 1.708.706.768,00	Rp 1.700.066.556,00	Rp 583.092.098,00
7	JULI	Rp 210.371.895,00	Rp 38.436.702,00	Rp 2.586.980.605,00	Rp 221.361.205,00	Rp	-	Rp 540.000,00	Rp 3.047.530.411,00	Rp 2.015.040.988,00	Rp 1.615.581.516,00
8	AGUSTUS	Rp 39.043.471,00	Rp 25.544.841,00	Rp 382.607.549,00	Rp 60.811.971,00	Rp	-	Rp 4.681.000,00	Rp 492.618.932,00	Rp 1.622.223.814,00	Rp 485.976.616,00
9	SEPTEMBER	Rp 41.070.880,00	Rp 13.823.400,00	Rp 2.455.496.271,00	Rp 98.119.639,00	Rp	7.500.000,00	Rp 280.500,00	Rp 2.656.295.084,00	Rp 1.935.101.517,00	Rp 1.187.171.113,00
10	OCTOBER	Rp 38.287.731,00	Rp 16.711.922,00	Rp 1.411.911.727,00	Rp 41.896.676,00	Rp	36.000.000,00	Rp 320.000,00	Rp 1.565.148.061,00	Rp 1.187.171.113,00	Rp 1.565.148.061,00
11	NOVEMBER	Rp 32.738.207,00	Rp 25.863.233,00	Rp 174.934.742,00	Rp 54.463.796,00	Rp	-	Rp 6.111.272,00	Rp 311.333.050,00	Rp 1.565.148.561,00	Rp 311.333.050,00
12	DESEMBER	Rp 54.993.226,00	Rp 48.654.914,00	Rp 2.901.426.397,00	Rp 160.309.880,00	Rp	-	Rp 760.000,00	Rp 3.166.738.471,00	Rp 3.476.625.542,00	Rp 1.445.959,00
TOTAL		Rp 1.184.321.700,00	Rp 411.366.036,00	Rp 18.194.948.271,00	Rp 574.339.369,00	Rp	81.608.108,00	Rp 16.292.912,00	Rp 20.782.896.472,00	Rp 20.794.708.782,00	

MENGETAHUI,
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dr.ASEP GUNTUR SAPARI,MARS
Pembina Tk.IV/b
NIP.19770709 200502 1 003

WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN
RSKO ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

VIRA JANISA REGPATY,SH,M.Hum
Pembina/IV.a
NIP.198009122011012007

BENDAHARA PENERIMAAN
RSKO ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GEMILNASTITI,SKM
Penata Tk.III/c
NIP. 19821223 200801 2 001

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENGHARGAAN "KARIMUN OBAT"
KABUPATEN KARIMUN
Jalan Ir. Soekarno Hatta – Simpang Diponegoro Parit no. 1 Tanjung Uban, Kode Pos 29152
Telepon. (0771) 4000000 ; 4007000 Faks. (0771) 4000000
E-mail : rsudkarimun@kepriprov.go.id Website : www.rsudkarimun.kepriprov.go.id

BUKU PENERIMAAN DESEMBER 2025

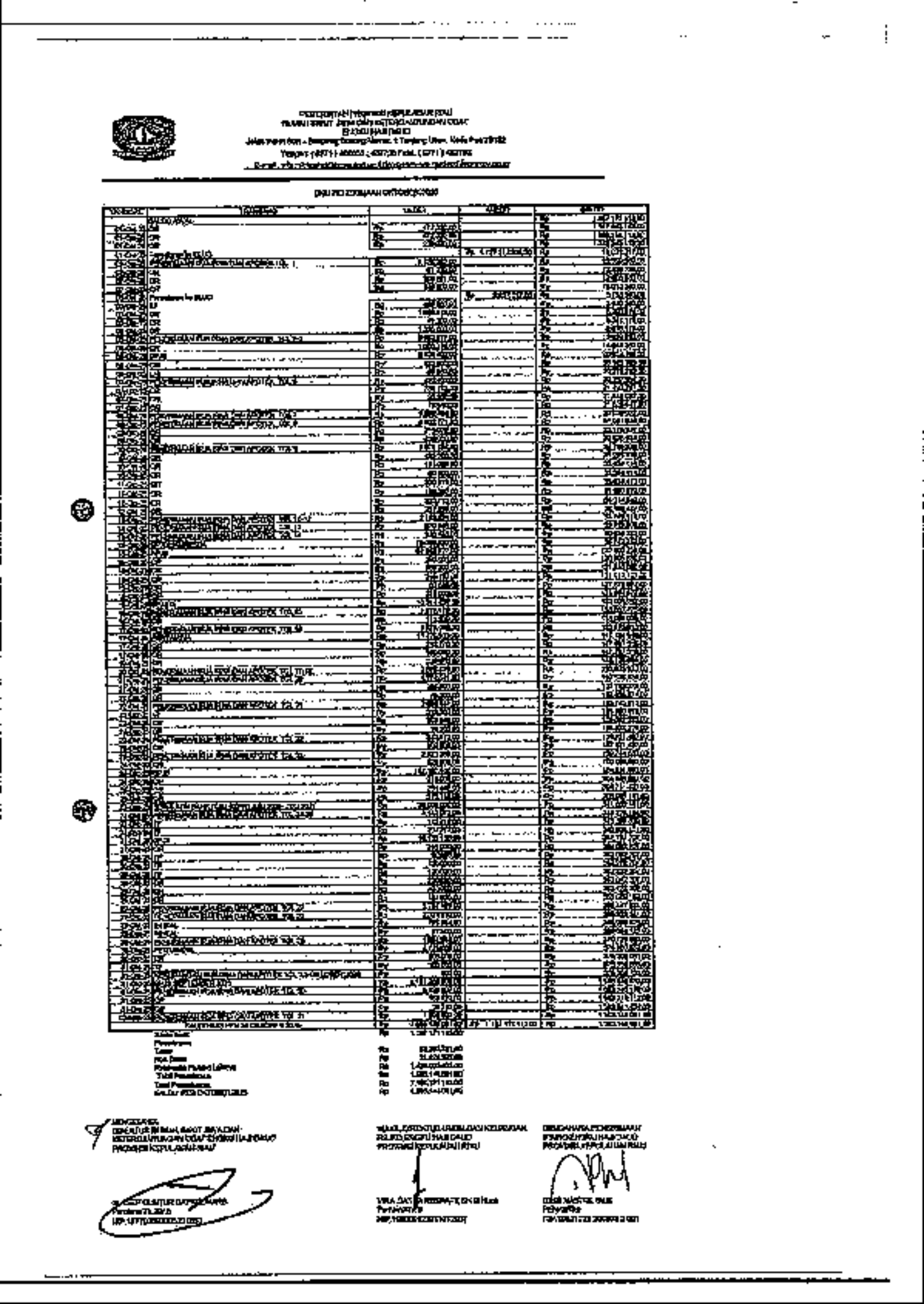
TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			Rp 311.000.000,00
01-Dec-25	SPP	Rp 187.500.000		Rp 311.000.000,00
01-Dec-25	SPP	Rp 250.000.000		Rp 311.000.000,00
01-Dec-25	SPP	Rp 187.500.000		Rp 311.000.000,00
01-Dec-25	SPP	Rp 4.687.500.000		Rp 311.000.000,00
01-Dec-25	SPP	Rp 250.000.000		Rp 311.000.000,00
01-Dec-25	SPP	Rp 375.000.000		Rp 311.000.000,00
01-Dec-25	SPP	Rp 1.500.000.000		Rp 311.000.000,00
01-Dec-25	SPP	Rp 3.750.000.000		Rp 311.000.000,00
01-Dec-25	SPP	Rp 750.000.000		Rp 311.000.000,00
01-Dec-25	SPP	Rp 187.500.000		Rp 311.000.000,00
02-Dec-25	Penerimaan Bunga		Rp 15.000.000,00	Rp 311.000.000,00
02-Dec-25	SPP	Rp 375.000.000		Rp 311.000.000,00
02-Dec-25	SPP	Rp 187.500



[illegible]

[illegible]

[illegible]



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
(BLUD)
Jalan Sydney Dan – Bintang Tujuh Nomor. 8 Tanjung Uban Kiara Pos 29132
Telepon. (0771) 4000000 ; 4012345 Faks. (0771) 4012345
E-mail : rsjkobkepri@yahoo.co.id Website : www.rsjkobkepri.kepriprov.go.id

BKU PENERIMAAN SEPTEMBER 2025

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
	Saldo Awal			Rp 4.000.000.000
01-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.250.000.000		Rp 5.250.000.000
01-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 875.000.000		Rp 6.125.000.000
01-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Instalasi Gawat Darurat	Rp 420.000.000		Rp 6.545.000.000
02-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.180.000.000		Rp 7.725.000.000
02-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 760.000.000		Rp 8.485.000.000
02-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium	Rp 310.000.000		Rp 8.795.000.000
03-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.320.000.000		Rp 10.115.000.000
03-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 690.000.000		Rp 10.805.000.000
03-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Farmasi	Rp 540.000.000		Rp 11.345.000.000
04-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.150.000.000		Rp 12.495.000.000
04-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 715.000.000		Rp 13.210.000.000
04-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Radiologi	Rp 285.000.000		Rp 13.495.000.000
05-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.090.000.000		Rp 14.585.000.000
05-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 640.000.000		Rp 15.225.000.000
05-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium	Rp 260.000.000		Rp 15.485.000.000
06-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.210.000.000		Rp 16.695.000.000
06-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 735.000.000		Rp 17.430.000.000
06-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Farmasi	Rp 495.000.000		Rp 17.925.000.000
07-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.275.000.000		Rp 19.200.000.000
07-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 780.000.000		Rp 19.980.000.000
07-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium	Rp 305.000.000		Rp 20.285.000.000
08-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.140.000.000		Rp 21.425.000.000
08-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 690.000.000		Rp 22.115.000.000
08-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Radiologi	Rp 270.000.000		Rp 22.385.000.000
09-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.305.000.000		Rp 23.690.000.000
09-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 745.000.000		Rp 24.435.000.000
09-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Farmasi	Rp 520.000.000		Rp 24.955.000.000
10-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.195.000.000		Rp 26.150.000.000
10-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 705.000.000		Rp 26.855.000.000
10-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium	Rp 295.000.000		Rp 27.150.000.000
11-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.260.000.000		Rp 28.410.000.000
11-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 760.000.000		Rp 29.170.000.000
11-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Radiologi	Rp 280.000.000		Rp 29.450.000.000
12-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.225.000.000		Rp 30.675.000.000
12-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 730.000.000		Rp 31.405.000.000
12-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Farmasi	Rp 505.000.000		Rp 31.910.000.000
13-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.180.000.000		Rp 33.090.000.000
13-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 695.000.000		Rp 33.785.000.000
13-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium	Rp 275.000.000		Rp 34.060.000.000
14-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.295.000.000		Rp 35.355.000.000
14-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 750.000.000		Rp 36.105.000.000
14-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Farmasi	Rp 515.000.000		Rp 36.620.000.000
15-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.210.000.000		Rp 37.830.000.000
15-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 715.000.000		Rp 38.545.000.000
15-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Radiologi	Rp 290.000.000		Rp 38.835.000.000
16-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.340.000.000		Rp 40.175.000.000
16-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 770.000.000		Rp 40.945.000.000
16-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium	Rp 310.000.000		Rp 41.255.000.000
17-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.225.000.000		Rp 42.480.000.000
17-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 735.000.000		Rp 43.215.000.000
17-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Farmasi	Rp 525.000.000		Rp 43.740.000.000
18-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.265.000.000		Rp 45.005.000.000
18-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 745.000.000		Rp 45.750.000.000
18-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Radiologi	Rp 295.000.000		Rp 46.045.000.000
19-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.310.000.000		Rp 47.355.000.000
19-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 760.000.000		Rp 48.115.000.000
19-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium	Rp 300.000.000		Rp 48.415.000.000
20-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.245.000.000		Rp 49.660.000.000
20-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 725.000.000		Rp 50.385.000.000
20-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Farmasi	Rp 510.000.000		Rp 50.895.000.000
21-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.275.000.000		Rp 52.170.000.000
21-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 740.000.000		Rp 52.910.000.000
21-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Radiologi	Rp 285.000.000		Rp 53.195.000.000
22-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.330.000.000		Rp 54.525.000.000
22-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 765.000.000		Rp 55.290.000.000
22-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium	Rp 305.000.000		Rp 55.595.000.000
23-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.240.000.000		Rp 56.835.000.000
23-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 720.000.000		Rp 57.555.000.000
23-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Farmasi	Rp 500.000.000		Rp 58.055.000.000
24-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.285.000.000		Rp 59.340.000.000
24-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 750.000.000		Rp 60.090.000.000
24-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Radiologi	Rp 290.000.000		Rp 60.380.000.000
25-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.315.000.000		Rp 61.695.000.000
25-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 765.000.000		Rp 62.460.000.000
25-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium	Rp 310.000.000		Rp 62.770.000.000
26-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.250.000.000		Rp 64.020.000.000
26-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 730.000.000		Rp 64.750.000.000
26-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Farmasi	Rp 515.000.000		Rp 65.265.000.000
27-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.290.000.000		Rp 66.555.000.000
27-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 755.000.000		Rp 67.310.000.000
27-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Radiologi	Rp 295.000.000		Rp 67.605.000.000
28-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.320.000.000		Rp 68.925.000.000
28-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 770.000.000		Rp 69.695.000.000
28-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium	Rp 315.000.000		Rp 70.010.000.000
29-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.255.000.000		Rp 71.265.000.000
29-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 735.000.000		Rp 72.000.000.000
29-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Farmasi	Rp 520.000.000		Rp 72.520.000.000
30-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	Rp 1.300.000.000		Rp 73.820.000.000
30-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	Rp 760.000.000		Rp 74.580.000.000
30-Sep-25	Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Radiologi	Rp 300.000.000		Rp 74.880.000.000
	Jumlah Arus Kas Masuk September 2025	Rp 74.880.000.000	Rp 0	Rp 74.880.000.000

Saldo Awal	Rp	4.000.000.000
Penerimaan		
Tunai	Rp	70.880.000.000
Non Tunai	Rp	0
Pelayanan Jaminan Lainnya	Rp	0
Total penerimaan	Rp	70.880.000.000
Pengeluaran		
Total pengeluaran	Rp	0
SALDO BKU SEPTEMBER 2025	Rp	74.880.000.000

Mengetahui,
Direktur Rumah Sakit Jiwa dan
Ketergantungan Obat Kepulauan Riau
Provinsi Kepulauan Riau

dr. Asep Gunawan Supriyadi, M.Kes
Pembina Tk. IV/a
NIP. 19720315 200212 1 001

Verifikasi Keuangan dan Pelaporan
Rumah Sakit Jiwa dan
Ketergantungan Obat

Nurul Jannah, S.E., M.Si.
Penata Tk. I/d
NIP. 19850612 201001 2 004

Bendahara Penerimaan
Rumah Sakit Jiwa dan
Ketergantungan Obat

Citra Ramadhani, S.Kom
Penata Muda Tk. I/b
NIP. 19910804 201903 2 011



[illegible]

[illegible]

[illegible]

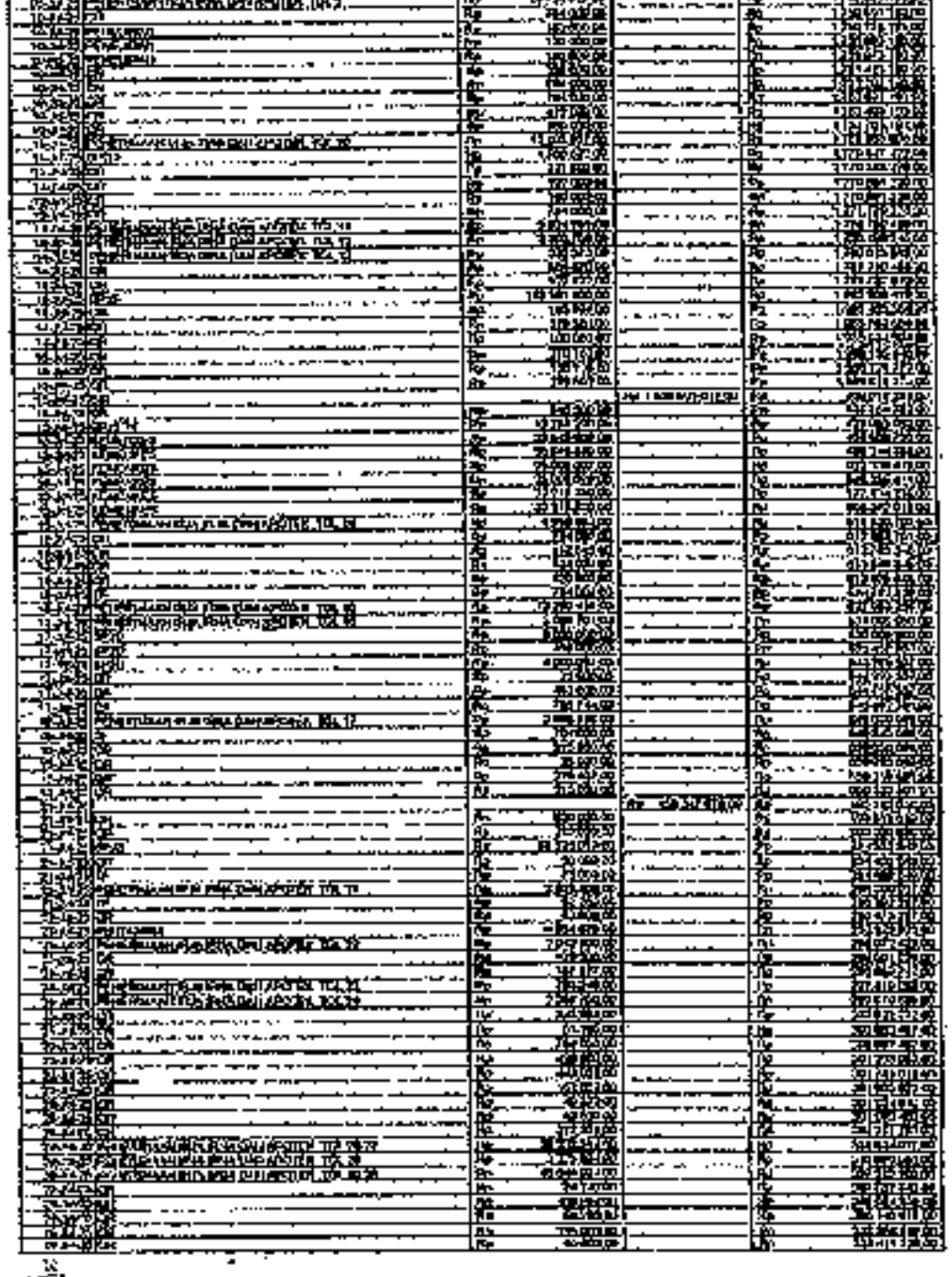
TOTAL	Rp	[illegible]
Pengalaman Total Pengalaman	Rp	[illegible]
SALDO PERPANJANGAN	Rp	[illegible]

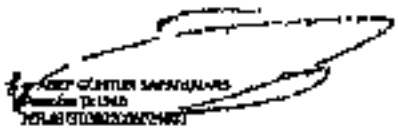
MENGETAHUI,
[illegible]

[illegible]

[illegible]

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KESEHATAN
Jalan Jenderal Sudirman – Simpang Empat, Pekanbaru
Telepon (0761) 23456











PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS DAERAH BADAN PENGAWASAN OBAT
PANGAN DAN KOSMETIK
Jalan Sukajadi Barat – Sungai Beduang Blok C, 1 Tanjung Uban, Kode Pos 29152
Telepon. (0771) 45855, 46756 Faks. (0771) 46756
Email: [illegible]

BUKU PENERIMAAN BANK DAERAH

TANGGAL	PENERIMAAN	DEBET	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			Rp [illegible]
[illegible]	TF	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	SKR	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	PAFI	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	SPK	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	SPK	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	SPK	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	SPK	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	[illegible]	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	SPK	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	SPK NO. [illegible]	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD
Jalan Letnan Dua – Simpang Hulang Kabupaten Tanjung Uban Kode Pos 29157
Telepon (0771) 42356 ; 4627 06 Faks. (0771) 4627 06
Email

DAFTAR PENERIMAAN OBAT

TANGGAL	KETERANGAN	MASUK	KELUAR	SISA
	SALDO AWAL			Rp.
	OBAT	Rp.		Rp.
	OBAT	Rp.		Rp.
	PENGEMBALIAN OBAT DARI APOTEK TGL 1	Rp.		Rp.
	PENITIPAN	Rp.		Rp.
	OBAT	Rp.		Rp.
	OBAT	Rp.		Rp.
	OBAT	Rp.		Rp.
	OBAT	Rp.		Rp.
	OBAT	Rp.		Rp.
	OBAT	Rp.		Rp.
	OBAT	Rp.		Rp.
	OBAT	Rp.		Rp.
	OBAT	Rp.		Rp.
	OBAT	Rp.		Rp.
	OBAT	Rp.		Rp.
	PENGEMBALIAN OBAT DARI APOTEK TGL 2	Rp.		Rp.
	OBAT	Rp.		Rp.
	OBAT	Rp.		Rp.
	OBAT	Rp.		Rp.
	OBAT	Rp.		Rp.
	OBAT	Rp.		Rp.
	OBAT	Rp.		Rp.
	OBAT	Rp.		Rp.
	OBAT	Rp.		Rp.
	OBAT	Rp.		Rp.
	OBAT	Rp.		Rp.
	OBAT

[illegible]	[illegible]	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
[illegible]	PENERIMAAN JASA GIRO DAN JASA GIRO	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Rp	[illegible]	Rp	[illegible]	Rp	[illegible]

Saldo Awal Rp [illegible]
Penerimaan
Transfer Rp [illegible]
Pendapatan Pajak Daerah Rp [illegible]
Lainnya Rp [illegible]
Total Penerimaan Rp [illegible] Rp 1,765,239,447,00

Pengeluaran
Total Pengeluaran Rp 1,743,007,140,00

SALDO PERIODE 2025 Rp [illegible]

MENGETAHUI/MENYETUJUI
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

[illegible]
NIP. [illegible]

MENGETAHUI/MENYETUJUI
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

[illegible]
Pembina Tk. I
NIP. [illegible]

BENDAHARA PENERIMAAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

[illegible]
Pembina
NIP. [illegible]

PEMERINTAH PROVINSI [KEPULAUAN RIAU]
RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
[PROVINSI KEPULAUAN RIAU]
Jalan [Letjen Suprapto – Simpang Rumbai, Medan], Tanjung Uban, Kabupaten [Bintan]
Telepon: (0771) [46225], Faksimile: [0771] [45208]
[www.rsjkodepulauanriau.com], [rsjkodepulauanriau@gmail.com]

BUKU PENERIMAAN APRIL 2025

TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			Rp [redacted]
[redacted]	[redacted]	Rp [redacted]





PEMERINTAH PROVINSI [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

TANGGAL	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			Rp [illegible]
[illegible]	TF	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	DR	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	TF	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	TF	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	TF	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	DR	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	[illegible]	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	DR	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	[illegible]	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	PEMBAYARAN JKN RSNU DAN APOTEK TGL 15	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	DR	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	DR	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	DR	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	TF	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	PEMBAYARAN JKN RSNU DAN APOTEK TGL 16	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	TF	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	PEMBAYARAN JKN RSNU DAN APOTEK TGL 17	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	DR	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	PENGEMBALIAN KE DUTA (BPJS)	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	DR	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	DR	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	TF	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	PEMBAYARAN JKN RSNU DAN APOTEK TGL 18	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	PENGEMBALIAN JKN RSNU DAN APOTEK TGL 18	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	DR	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	PENGEMBALIAN JKN RSNU DAN APOTEK TGL 19	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	DR	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	PEMBAYARAN JKN RSNU DAN APOTEK TGL 19	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	DR	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	DR	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	DR	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	PEMBAYARAN JKN RSNU DAN APOTEK TGL 20	Rp [illegible]		Rp [illegible]
[illegible]	DR

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD

Jalan Indun Sari – Simpang Rumah Hakim, Jl. Tanjung Uban, Kode Pos 29152

Telepon (0771) 402800, 407295 Faks. (0771) 402805

E-mail: [redacted]

DAFTAR PENGETORAN UANG TUNAI 2024

TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			Rp 3.252.948,00
05-Jan-24	PAJU PEMBAYARAN RUANG OVA DAN APOTEK TGL 4	Rp 4.333.052,00		Rp 4.581.483,00
07-Jan-24	PENARIKAN UANG TUNAI	Rp 4.000.000,00		Rp 4.581.483,00
07-Jan-24	DP	Rp 581.483,00		Rp 4.000.000,00
08-Jan-24	PENARIKAN UANG TUNAI		Rp 218.000,00	Rp 4.779.758,00
09-Jan-24	DP	Rp 4.000.000,00		Rp 8.779.758,00
10-Jan-24	DP	Rp 784.000,00		Rp 9.563.758,00
10-Jan-24	DP	Rp 784.000,00		Rp 10.347.758,00
10-Jan-24	PENERIMAAN PIUTANG OBAT APOTEK TGL 2	Rp 2.860.238,00		Rp 13.207.996,00
10-Jan-24	PENGETORAN KE BLUD		Rp 3.045.240,00	Rp 10.162.756,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 10.946.756,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 11.730.756,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 12.514.756,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 13.298.756,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 14.082.756,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 14.866.756,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 15.650.756,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 16.434.756,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 17.218.756,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 18.002.756,00
10-Jan-24	PENERIMAAN PIUTANG OBAT APOTEK TGL 5	Rp 2.760.423,00		Rp 20.763.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 21.547.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 22.331.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 23.115.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 23.899.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 24.683.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 25.467.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 26.251.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 27.035.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 27.819.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 28.603.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 29.387.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 30.171.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 30.955.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 31.739.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 32.523.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 33.307.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 34.091.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 34.875.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 35.659.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 36.443.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 37.227.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 38.011.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 38.795.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 39.579.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 40.363.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 41.147.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 41.931.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 42.715.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 43.499.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 44.283.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 45.067.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 45.851.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 46.635.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 47.419.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 48.203.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 48.987.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 49.771.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 50.555.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 51.339.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 52.123.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 52.907.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 53.691.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 54.475.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 55.259.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 56.043.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 56.827.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 57.611.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 58.395.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 59.179.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 59.963.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 60.747.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 61.531.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 62.315.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 63.099.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 63.883.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 64.667.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 65.451.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 66.235.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 67.019.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 67.803.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 68.587.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 69.371.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 70.155.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 70.939.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 71.723.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 72.507.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 73.291.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 74.075.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 74.859.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 75.643.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 76.427.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 77.211.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 77.995.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 78.779.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 79.563.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 80.347.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 81.131.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 81.915.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 82.699.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 83.483.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 84.267.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 85.051.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 85.835.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 86.619.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 87.403.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 88.187.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 88.971.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 89.755.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 90.539.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 91.323.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 92.107.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 92.891.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 93.675.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 94.459.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 95.243.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 96.027.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 96.811.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 97.595.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 98.379.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 99.163.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 99.947.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 100.731.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 101.515.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 102.299.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 103.083.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 103.867.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 104.651.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 105.435.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 106.219.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 107.003.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 107.787.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 108.571.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 109.355.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 110.139.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 110.923.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 111.707.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 112.491.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 113.275.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 114.059.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 114.843.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 115.627.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 116.411.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 117.195.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 117.979.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 118.763.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 119.547.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 120.331.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 121.115.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 121.899.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 122.683.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 123.467.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 124.251.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 125.035.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 125.819.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 126.603.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 127.387.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 128.171.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 128.955.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 129.739.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 130.523.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 131.307.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 132.091.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 132.875.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 133.659.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 134.443.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 135.227.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 136.011.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 136.795.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 137.579.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 138.363.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 139.147.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 139.931.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 140.715.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 141.499.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 142.283.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 143.067.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 143.851.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 144.635.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 145.419.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 146.203.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 146.987.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 147.771.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 148.555.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 149.339.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 150.123.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 150.907.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 151.691.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 152.475.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 153.259.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 154.043.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 154.827.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 155.611.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 156.395.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 157.179.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 157.963.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 158.747.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 159.531.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 160.315.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 161.099.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 161.883.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 162.667.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 163.451.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 164.235.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 165.019.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 165.803.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 166.587.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 167.371.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 168.155.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 168.939.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 169.723.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 170.507.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 171.291.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 172.075.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 172.859.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 173.643.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 174.427.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 175.211.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 175.995.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 176.779.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 177.563.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 178.347.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 179.131.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 179.915.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 180.699.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 181.483.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 182.267.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 183.051.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 183.835.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 184.619.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 185.403.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 186.187.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 186.971.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 187.755.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 188.539.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 189.323.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 190.107.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 190.891.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 191.675.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 192.459.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 193.243.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 194.027.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 194.811.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 195.595.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 196.379.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 197.163.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 197.947.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 198.731.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 199.515.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 200.299.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 201.083.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 201.867.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 202.651.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 203.435.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 204.219.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 205.003.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 205.787.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 206.571.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 207.355.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 208.139.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 208.923.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 209.707.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 210.491.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 211.275.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 212.059.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 212.843.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 213.627.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 214.411.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 215.195.179,00
10-Jan-24	TRANSF	Rp 784.000,00		Rp 215.979.179,00

[illegible]	TRANSF	Rp	[illegible]		Rp	[illegible]
[illegible]	TRANSF	Rp	[illegible]		Rp	[illegible]
[illegible]	TRANSF	Rp	[illegible]		Rp	[illegible]
[illegible]	TRANSF	Rp	[illegible]		Rp	[illegible]
[illegible]	TRANSF	Rp	[illegible]		Rp	[illegible]
[illegible]	TRANSF	Rp	[illegible]		Rp	[illegible]
[illegible]	PEMERIKSAAN MATA, BIDAN DAN APOTEK, TGL 8	Rp	[illegible]		Rp	[illegible]
[illegible]	TRANSF

23-Jan-26	TRANSF	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
27-Jan-26	TRANSF	Rp	400.000,00			Rp	872.012.185,00
28-Jan-26	TRANSF	Rp	400.000,00			Rp	927.812.185,00
29-Jan-26	TRANSF	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
29-Jan-26	TRANSF	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
29-Jan-26	TRANSF	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
29-Jan-26	TRANSF	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
29-Jan-26	TRANSF	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
30-Jan-26	QR	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
30-Jan-26	TRANSF	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
30-Jan-26	TRANSF	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
30-Jan-26	TRANSF	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
30-Jan-26	TRANSF	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
30-Jan-26	TRANSF	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
30-Jan-26	TRANSF	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
30-Jan-26	PENGAMBILAN TABUNGAN	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
30-Jan-26	PENGAMBILAN TABUNGAN	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
30-Jan-26	TRANSF	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
30-Jan-26	TRANSF	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
30-Jan-26	TRANSF	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
30-Jan-26	TRANSF	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
30-Jan-26	TRANSF	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
30-Jan-26	TRANSF	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
30-Jan-26	TRANSF	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
31-Jan-26	BIAYA ADM	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
31-Jan-26	BIAYA ADM	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
31-Jan-26	QR	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
31-Jan-26	BPJS	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
31-Jan-26	PPJ	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
31-Jan-26	QR	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
31-Jan-26	QR	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
31-Jan-26	QR	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
31-Jan-26	QR	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
01-Feb-26	[illegible]	Rp	[illegible]			Rp	[illegible]
[illegible]		Rp	[illegible]	Rp	[illegible]	Rp	[illegible]

Saldo Awal	Rp	[illegible]	
Pemasukan			
Transfer	Rp	[illegible]	
Bunga	Rp	[illegible]	
Pengembalian Kelebihan Pembayaran	Rp	[illegible]	
Total Pemasukan			Rp [illegible]
Pengeluaran			
Pengembalian Kelebihan Pembayaran	Rp	[illegible]	
Total Pengeluaran			Rp [illegible]
SALDO PER 31 Januari 2026	Rp	[illegible]	

MENGETAHUI,
DIREKTUR PERUMDA AIR MINUM TIRTA DAYO
KETERSANTUNGAN DOAT ENGIDU TAU DAYO
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

[illegible]
Pembina TK I/IV.b
NIP. [illegible]

WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN
PERUMDA AIR MINUM TIRTA DAYO
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

[illegible]
Pembina Tk I/IV.b
NIP [illegible]

BENDAHARA PENERIMAAN
PERUMDA AIR MINUM TIRTA DAYO
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

[illegible]
Pembina/IV.c
NIP [illegible]

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Sungai Pulai
Kawasan Perkantoran Bukit Mayang Mangkut Bukit Cermin Kota Air (Gedung Pola Air)
Pulau Dompak, Seri Bayu Maksum – Tanjungpinang Kode Pos : 29123
Pos-el : [illegible]

BERITA ACARA PENGUJIAN DATA KEUANGAN
PERIODE 1 (SATU) S/D DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

Hari/Tanggal :
Tempat : Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kepri

Telah dilakukan Pemeriksaan Data Keuangan, antara BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan [illegible] dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Data Kas [illegible]

NO.	URAIAN	JUMLAH			KETERANGAN
		BKU / Rekap Cabang	Rekening Koran	Selisih	
1	Cabang BLUD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Jumlah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

B. Rincian [illegible]

No.	URAIAN	Biaya Operasional BLUD	Pendapatan Non Operasional BLUD	Jumlah Seluruh BLUD	KETERANGAN
1	Saldo BLUD	[illegible]	[illegible]	61.140.000,00	
		[illegible]	[illegible]	61.140.000,00	

[illegible] -10.577.847,00

C. Saldo [illegible]

NO		NAMA BANK	NAMA REKENING	NO REKENING	SALDO AKHIR	KETERANGAN
1	Saldo Rekening Koran Bank Periode 31 Desember 2025	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	Saldo Rekening Koran Bank Periode 31 Desember 2025	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	

PUTRAH BADIT JAWAB [illegible]

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pelaksana Pemeriksa,

[illegible]

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
Provinsi Kepulauan Riau
Aliran Kas Pengeluaran BLUD TA 2025
Per tanggal : 06 Januari 2026

NO.	URAIAN	Nilai (Rp.)	
	Saldo Awal 2025	637.594.261,48	
	Pendapatan 2025	20.781.460.533,00	21.419.054.794,48
1.1	Anggaran dalam DPA TA 2025		20.137.554.242,00
2	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
	1) Uang Persediaan (UP)	185.000.000,00	
	2) Tambahan Uang (TU)		
	3) Ganti Uang (GU)	1.353.759.462,00	
	4) Langsung (LS)	19.701.120.059,00	
	Jumlah SP2D		21.239.879.521,00
3	Sisa Dana (1 - 2)		179.126.263,48
4	Surat Pertanggungjawaban (SPJ)		
	1) Ganti Uang (GU) (TBP UP/ TBP GU)	184.957.174,00	
	2) Ganti Uang Nihil (GU Nihil)	1.343.094.247,00	
	3) Tambahan Uang Nihil (TU Nihil) (TBP TU)		
	4) Langsung (LS)	19.701.120.059,00	
	Jumlah SPJ		21.229.201.480,00
	Koreksi Belanja		
	Jumlah SPJ Penyesuaian		21.229.201.480,00
5	Sisa Anggaran TBP (Pasal 14)		169.803.304,48
6	UYHD (2-5)		10.877.041,00
7	Setoran Sisa UP dan TU s/d 31 Desember 2025		
	1) STS UP/GU	10.877.041,00	
	2) STS TU	-	
	3) Setoran Kelebihan Belanja	-	
	Jumlah setoran STUP, STTU, dan Setoran Pengembalian Belanja s/d 31/12/2025		10.877.041,00
8	Sisa UYHD yang masih harus disetor (6-7)		
9	Pungutan Pajak	79.993.489,00	
	Setoran Pajak	79.993.249,00	
	Saldo Pajak yang belum disetor		240,00
10	Pengeluaran yang belum di SPJkan		
11	Saldo Buku Kas per 31/12/2025 (6+8+10)		169.803.304,48
	Penerimaan s/d tanggal 01/01/2026		1.081.445.939,00
12	Pengeluaran TNT tanggal 01/01/2026 s/d tanggal	06 Januari 2026	
	-Setoran Sisa UP dan TU		
	-Belanja tgl ... s/d ...		
	Jumlah pengeluaran tnt tgl 01/01/2026 s/d tgl	06 Januari 2026	
13	Saldo Buku Kas per tgl 06 Januari 2026 = (11-12)		1.251.249.243,48
14	Saldo Kas per tgl 06 Januari 2026		
	1) Uang Tunai		
	2) Saldo Bank/Rekening Koran	1.251.249.243,48	
	3) SPM dan Alat Pembayaran Lainnya		
	Jumlah Fisik Kas		1.251.249.243,48
15	Selisih lebih/kurang kas (13-14)		(0,00)

Mengetahui
Bendahara Pengeluaran BLUD
Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat
Engku Haji Daud

Tim Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau

1 HARIYANG SAMBODO, SE,MAP
NIP 197810042000041012

2 MARWANI, S.Pd
NIP 196003052015032005

3 ZETRA OKTAFIANDRI, S.St,M.Pd
NIP 198410192015031001

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini, tanggal 05 Januari 2026, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : [redacted]
   NIP. : [redacted]
   Jabatan : Pengendali Teknis

2. Nama : [redacted]
   NIP. : [redacted]
   Jabatan : Ketua

3. Nama : [redacted]
   NIP. : [redacted]
   Jabatan : Anggota

Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor [redacted] tanggal 31 Oktober 2025 telah melaksanakan pemeriksaan kas tunai di Kas Umum pada Biro Kepulauan Riau.

Nama : [redacted]
NIP : [redacted]
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran Kepulauan Riau Nomor : 14 TAHUN 2025 dengan saldo Rp [redacted]

Bahwa Biro Kepulauan Riau telah melakukan Pemeriksaan Kas Tunai pada tanggal 5 Januari 2026 dengan hasil sebagai berikut :

a. Uang Tunai dan uang kertas	Rp	-
b. [redacted]	Rp	-
c. Saldo Bank Biro Kepulauan Riau	Rp	[redacted]
d. [redacted]	Rp	-
e. [redacted]	Rp	-
Jumlah	Rp	[redacted]

Saldo Pembukuan :

a. Saldo awal	Rp	[redacted]
b. Jumlah Penerimaan s/d 31 Desember 2025	Rp	[redacted]
c. Jumlah Pengeluaran s/d 31 Desember 2025	Rp	[redacted]
Saldo uang seharusnya tanggal 31 Desember 2025	Rp	[redacted]
Penerimaan 1 Januari 2026 s/d tgl [redacted]	Rp	-
Pengeluaran 1 Januari 2026 s/d tgl [redacted]	Rp	-
Saldo uang seharusnya tanggal 5 Januari 2026	Rp	[redacted]

Selisih kurang / lebih uang tunai dan bank

Perhatikan Posisi Tanggal yang :

Keterangan : Saldo merupakan posisi yang belum disetor per 31 Desember 2025, dan akan telah disetorkan tanggal 5 Januari 2026.

Tim Pemeriksa

1. [redacted]
   NIP [redacted]

2. [redacted]
   NIP [redacted]

3. [redacted]
   NIP [redacted]

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 7

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS TA 2025
Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau

REGISTER PENUTUPAN KAS

Penutupan Kas	: 6 Januari 2026		
Nama Bendahara Pengeluaran	: Asmiranja Manik Bunga Ni Sitanggang,S.KM,MKM		
Tanggal Penutupan Kas Lalu	: 31 Desember 2025		
Jumlah Penerimaan	: s/d 31 Desember 2025	Rp.	21,419,004,754.48
Jumlah Pengeluaran	: s/d 31 Desember 2025	Rp.	21,229,201,450.00
	Saldo uang menurut Buku per 31-12-2025	Rp.	189,803,304.48
	Penerimaan 01/01/2026 s.d 6 Januari 2026	Rp.	-
	Pengeluaran 01/01/2026 s.d 6 Januari 2026	Rp.	-
	Saldo Buku per tanggal 6 Januari 2026	Rp.	189,803,304.48
	Saldo Kas per tanggal 6 Januari 2026	Rp.	189,117,554.48

Uang Kertas Nilai	Rp.	100.000	x	Lembar	=	Rp.	-
Uang Kertas Nilai	Rp.	50.000	x	Lembar	=	Rp.	-
Uang Kertas Nilai	Rp.	20.000	x	Lembar	=	Rp.	-
Uang Kertas Nilai	Rp.	10.000	x	Lembar	=	Rp.	-
Uang Kertas Nilai	Rp.	5.000	x	Lembar	=	Rp.	-
Uang Kertas Nilai	Rp.	2.000	x	Lembar	=	Rp.	-
Uang Kertas Nilai	Rp.	1.000	x	Lembar	=	Rp.	-
Uang Kertas Nilai	Rp.	500	x	Lembar	=	Rp.	-
Uang Logam Nilai	Rp.	1.000	x	Keping	=	Rp.	-
Uang Logam Nilai	Rp.	500	x	Keping	=	Rp.	-
Uang Logam Nilai	Rp.	200	x	Keping	=	Rp.	-
Uang Logam Nilai	Rp.	100	x	Keping	=	Rp.	-
Uang Logam Nilai	Rp.	50	x	Keping	=	Rp.	-
Uang Logam Nilai	Rp.	-	x	Keping	=	Rp.	-
Jumlah Uang Tunai (Uang Kertas / Uang Logam)						Rp.	-

Kartas Bercharga dan Bagian Kas yang dipisahkan

Uang Tunai	Rp.	-
Saldo Bank	Rp.	189,117,554.48
Total Kas	Rp.	189,117,554.48
Selisih kurang / lebih antara Saldo Kas dan Saldo Buku	Rp.	(314,250.00)

Perbedaan positif / negatif yaitu :

Keterangan : Setelah merupakan pajak yang belum disetor per 31 Desember 2025, dpt pajak telah disetor pada tanggal 6 Januari 2026

Tim Pemeriksa
Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau,

1. SAMBARIS BANGUNDO, SE,M
   NIP 197810182006041012
2. MARWARI, S.Sos
   NIP 196810052015032005
3. ZETRA OKTAPIANDRI, S.Si
   NIP 198410192015031001

Bendahara Pengeluaran
Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat
Engku Haji Daud Provinsi

Asmiranja Manik Bunga Ni Sitanggang,S.KM,MKM
NIP. 198709192014

Dipindai dengan CamScanner

REKAP HUTANG BLUD TAHUN 2025
(DATA PER 15 JANUARI 2026)

NO	KETERANGAN								NOMINAL	
	BELANJA BARANG DAN JASA									
1	Belanja Obat dan BHP									
	Bulan Mei 2025	Obat		BHP		Total		Pajak		
1	Duaime Industries, PT	Rp	-	Rp	33.275.540	Rp	33.275.540	Rp	499.133	Rp 32.776.407
2	Enseval Putera Megatrading, PT	Rp	107.332.423	Rp	-	Rp	107.332.423	Rp	1.609.986	Rp 105.722.437
3	Espana Int Perkasa, PT	Rp	-	Rp	49.550.000	Rp	49.550.000	Rp	743.250	Rp 48.806.750
4	Oasis Mitra Alkes, PT	Rp	-	Rp	25.902.600	Rp	25.902.600	Rp	388.539	Rp 25.514.061
5	Pant Padang Global, PT	Rp	20.861.654	Rp	-	Rp	20.861.654	Rp	312.925	Rp 20.548.729
6	Pelangi Rapha Semesta, PT	Rp	-	Rp	17.040.500	Rp	17.040.500	Rp	255.608	Rp 16.784.892
7	Wido Abadi Perkasa, PT	Rp	-	Rp	4.455.000	Rp	4.455.000	Rp	66.825	Rp 4.388.175
						Jumlah Hutang Obat & BHP bulan Mei 2025				Rp 258.417.717
	Bulan Juni 2025	Obat		BHP		Total				
1	Amanah Jaya Bersama, PT	Rp	-	Rp	63.701.932	Rp	63.701.932	Rp	955.529	Rp 62.746.403
2	Bintang Shafwan, PT	Rp	-	Rp	5.700.000	Rp	5.700.000	Rp	85.500	Rp 5.614.500
3	Enseval Putera Megatrading, PT	Rp	78.333.377	Rp	-	Rp	78.333.377	Rp	1.175.001	Rp 77.158.376
3	Enseval Putera Megatrading, PT	Rp	-	Rp	6.891.891	Rp	6.891.891	Rp	103.378	Rp 6.788.513
4	Espana Int Perkasa, PT	Rp	-	Rp	37.961.000	Rp	37.961.000	Rp	569.415	Rp 37.391.585
5	Gaboh Husada Farma, PT	Rp	-	Rp	61.425.550	Rp	61.425.550	Rp	921.383	Rp 60.504.167
6	Pant Padang Global, PT	Rp	38.448.145	Rp	-	Rp	38.448.145	Rp	576.722	Rp 37.871.423
7	Pelangi Rapha Semesta, PT	Rp	-	Rp	54.885.340	Rp	54.885.340	Rp	823.280	Rp 54.062.060
8	Wido Abadi Perkasa, PT	Rp	-	Rp	4.455.000	Rp	4.455.000	Rp	66.825	Rp 4.388.175
						Jumlah Hutang Obat & BHP bulan Juni 2025				Rp 351.802.235
	Bulan Juli 2025	Obat		BHP		Total				
1	Enseval Putera Megatrading, PT	Rp	151.161.548	Rp	-	Rp	151.161.548	Rp	2.267.425	Rp 148.894.223
2	Espana Int Perkasa, PT	Rp	-	Rp	43.830.000	Rp	43.830.000	Rp	657.450	Rp 43.172.550
3	Kimia Farma, PT	Rp	109.001.990	Rp	-	Rp	109.001.990	Rp	1.635.030	Rp 107.366.960
4	Millennium Pharmacon International, PT	Rp	-	Rp	16.410.000	Rp	16.410.000	Rp	246.150	Rp 16.163.850
5	Oasis Mitra Alkes, PT	Rp	-	Rp	24.843.955	Rp	24.843.955	Rp	372.659	Rp 24.471.296
6	Pant Padang Global, PT	Rp	106.102.483	Rp	-	Rp	106.102.483	Rp	1.591.537	Rp 104.510.946
6	Pant Padang Global, PT	Rp	-	Rp	50.104.400	Rp	50.104.400	Rp	751.566	Rp 49.352.834
7	Pelangi Rapha Semesta, PT	Rp	-	Rp	51.477.120	Rp	51.477.120	Rp	772.157	Rp 50.704.963
8	Wido Abadi Perkasa, PT	Rp	-	Rp	4.455.000	Rp	4.455.000	Rp	66.855	Rp 4.388.145
						Jumlah Hutang Obat & BHP bulan Juli 2025				Rp 557.386.596
	Bulan Agustus 2025	Obat		BHP		Total				
1	Amanah Jaya Bersama, PT	Rp	-	Rp	56.720.066	Rp	56.720.066	Rp	850.801	Rp 55.869.265
2	Enseval Putera Megatrading, PT	Rp	206.474.848	Rp	-	Rp	206.474.848	Rp	3.097.123	Rp 203.377.725
3	Enseval Putera Megatrading, PT	Rp	-	Rp	1.376.400	Rp	1.376.400	Rp		Rp 1.376.400
4	Espana Int Perkasa, PT	Rp	-	Rp	42.528.500	Rp	42.528.500	Rp	637.928	Rp 41.890.572
5	Gaboh Husada Farma, PT	Rp	-	Rp	69.606.900	Rp	69.606.900	Rp	1.044.104	Rp 68.562.796
6	Kimia Farma, PT	Rp	47.509.020			Rp	47.509.020	Rp	712.635	Rp 46.796.385
7	Oasis Mitra Alkes, PT	Rp	-	Rp	2.330.000	Rp	2.330.000	Rp	34.950	Rp 2.295.050

8	Parit Padang Global, PT	Rp	159.239.035	Rp	-	Rp	159.239.035	Rp	2.550.321	Rp	160.888.714
9	Pelangi Rapha Semesta, PT	Rp	-	Rp	46.670.172	Rp	46.670.172	Rp	896.665	Rp	47.871.819
10	Wido Abadi Perkasa, PT	Rp	-	Rp	11.125.000	Rp	11.125.000	Rp	160.875	Rp	10.898.125
	Jumlah Hutang Obat & BHP bulan Agustus 2025									Rp	837.628.941
	Bulan September 2025	Obat		BHP		Total					
1	Amanah Jaya Bersama, PT	Rp	-	Rp	91.714.560	Rp	91.714.560	Rp	1.375.718	Rp	90.338.842
2	Ensemi Putera Megatrading, PT	Rp	122.354.625	Rp	-	Rp	122.354.625	Rp	1.835.322	Rp	120.519.503
3	Ensemi Putera Megatrading, PT	Rp	-	Rp	3.211.600	Rp	3.211.600	Rp	48.174	Rp	3.163.426
4	Espana Inti Perkasa, PT	Rp	-	Rp	104.089.200	Rp	104.089.200	Rp	1.561.338	Rp	102.527.862
5	Gokoh Husada Farma, PT	Rp	-	Rp	9.004.320	Rp	9.004.320	Rp	135.065	Rp	8.869.255
6	Interaksi Sehat Sejahtera, PT	Rp	-	Rp	199.800.000	Rp	199.800.000	Rp	22.500.000	Rp	177.300.000
7	Kimia Farma, PT	Rp	141.152.252	Rp	-	Rp	141.152.252	Rp	2.117.284	Rp	139.034.968
8	Millennium Pharmacon International, PT	Rp	-	Rp	51.270.800	Rp	51.270.800	Rp	469.062	Rp	50.801.738
9	Oasis Mitra Alkes, PT	Rp	-	Rp	29.171.800	Rp	29.171.800	Rp	437.577	Rp	28.734.223
10	Parit Padang Global, PT	Rp	82.934.784	Rp	-	Rp	82.934.784	Rp	559.521	Rp	81.605.243
11	Parit Padang Global, PT	Rp	-	Rp	49.880.000	Rp	49.880.000	Rp	748.200	Rp	49.131.800
12	Pelangi Rapha Semesta, PT	Rp	-	Rp	30.464.024	Rp	30.464.024	Rp	456.960	Rp	30.007.064
13	Wido Abadi Perkasa, PT	Rp	-	Rp	8.910.000	Rp	8.910.000	Rp	133.650	Rp	8.776.350
	Jumlah Hutang Obat & BHP bulan September 2025									Rp	863.868.145
	Bulan Oktober 2025	Obat		BHP		Total					
1	Amanah Jaya Bersama, PT	Rp	-	Rp	42.110.000	Rp	42.110.000	Rp	631.650	Rp	41.478.350
2	Ensemi Putera Megatrading, PT	Rp	19.884.400	Rp	-	Rp	19.884.400	Rp	298.266	Rp	19.586.134
3	Espana Inti Perkasa, PT	Rp	-	Rp	26.540.000	Rp	26.540.000	Rp	398.100	Rp	26.169.900
4	Kimia Farma, PT	Rp	13.884.150	Rp	-	Rp	13.884.150	Rp	207.662	Rp	13.656.188
5	Oasis Mitra Alkes, PT	Rp	-	Rp	57.006.780	Rp	57.006.780	Rp	884.102	Rp	56.742.678
6	Parit Padang Global, PT	Rp	19.290.084	Rp	-	Rp	19.290.084	Rp	289.471	Rp	19.000.613
7	Pelangi Rapha Semesta, PT	Rp	-	Rp	139.968.040	Rp	139.968.040	Rp	2.097.991	Rp	137.768.049
	Jumlah Hutang Obat & BHP bulan Oktober 2025									Rp	318.188.434
	Bulan November 2025	Obat		BHP		Total					
1	Amanah Jaya Bersama, PT	Rp	-	Rp	25.792.568	Rp	25.792.568	Rp	386.894	Rp	25.405.672
2	Ensemi Putera Megatrading, PT	Rp	140.691.934	Rp	-	Rp	140.691.934	Rp	2.109.929	Rp	138.582.005
3	Espana Inti Perkasa, PT	Rp	-	Rp	134.188.080	Rp	134.188.080	Rp	2.012.970	Rp	132.185.090
4	Interaksi Sehat Sejahtera, PT	Rp	-	Rp	199.800.000	Rp	199.800.000	Rp	22.500.000	Rp	177.300.000
5	Mergo Nusantara Jaya, PT	Rp	10.000.000	Rp	-	Rp	10.000.000	Rp	150.000	Rp	9.850.000
6	Millennium Pharmacon International, PT	Rp	19.466.850	Rp	-	Rp	19.466.850	Rp	292.003	Rp	19.174.847
7	Oasis Mitra Alkes, PT	Rp	-	Rp	8.097.280	Rp	8.097.280	Rp	121.511	Rp	7.948.389
8	Pelangi Rapha Semesta, PT	Rp	-	Rp	25.197.720	Rp	25.197.720	Rp	377.966	Rp	24.819.754
9	Wido Abadi Perkasa, PT	Rp	-	Rp	4.455.000	Rp	4.455.000	Rp	66.825	Rp	4.388.175
	Jumlah Hutang Obat & BHP bulan November 2025									Rp	667.630.830
	Bulan Desember 2025	Obat		BHP		Total					
1	Amanah Jaya Bersama, PT	Rp	-	Rp	49.128.220	Rp	49.128.220	Rp	738.923	Rp	48.391.297
2	Ensemi Putera Megatrading, PT	Rp	22.980.400	Rp	-	Rp	22.980.400	Rp	344.976	Rp	22.653.424
3	Espana Inti Perkasa, PT	Rp	-	Rp	114.696.000	Rp	114.696.000	Rp	1.724.340	Rp	113.231.660
4	Interaksi Sehat Sejahtera, PT	Rp	-	Rp	399.600.000	Rp	399.600.000	Rp	48.000.000	Rp	354.600.000
5	Kimia Farma, PT	Rp	44.569.500	Rp	-	Rp	44.569.500	Rp	668.543	Rp	43.900.957

6	Millennium Pharmacon International, PT	Rp	9.657.324	Rp	-	**Rp**	**9.657.324**	Rp	144.860	Rp	9.512.464
7	Oasis Mitra Alkes, PT	Rp	-	Rp	59.618.500	**Rp**	**59.618.500**	Rp	894.278	Rp	58.724.222
8	Parit Padang Global, PT	Rp	72.582.158	Rp	-	**Rp**	**72.582.158**	Rp	1.088.732	Rp	71.493.426
9	Pelangi Rapha Semesta, PT	Rp	-	Rp	40.388.500	**Rp**	**40.388.500**	Rp	605.828	Rp	39.782.672
10	United Dico Citas, PT	Rp	29.653.251	Rp	-	**Rp**	**29.653.251**	Rp	444.799	Rp	29.208.452
11	Wide Abadi Perkasa, PT	Rp	-	Rp	8.910.000	**Rp**	**8.910.000**	Rp	133.650	Rp	8.776.350
	Jumlah Hutang Obat & BHP bulan Desember 2025									Rp	**852.061.853**
	TOTAL HUTANG OBAT & BHP 2025									Rp	4.435.464.781
								Total		Pajak	
2	Belanja Evakuasi dan Rujukan Parsial, Biaya Tiket Roro tanggal 16 sd 31 Desember 2025							Rp	1.244.276	Rp	-
3	Belanja Evakuasi & Rujukan Parsial, Evakuasi Pasien Jiwa tanggal 16 sd 31 Desember 2025							Rp	253.250	Rp	-
4	Belanja Evakuasi & Rujukan Parsial, Pengantaran Sampel dan Pengambilan Darah di PMI bulan Desember 2025							Rp	450.000	Rp	-
5	Belanja Evakuasi & Rujukan Parsial, Kegiatan Donor Darah Diluar Gedung RS tanggal 18 Desember 2025							Rp	1.200.000	Rp	-
6	Belanja Isi Ulang Oksigen (Liquid & Tabung) 2025, Bulan Mei 2025							Rp	168.270.400	**Rp**	**2.524.056**
7	Belanja Isi Ulang Oksigen (Liquid & Tabung) 2025, Bulan Juli 2025							Rp	180.965.200	**Rp**	**2.714.478**
8	Belanja Isi Ulang Oksigen (Liquid & Tabung) 2025, Bulan September 2025							Rp	178.546.000	**Rp**	**2.678.190**
9	Belanja Isi Ulang Oksigen (Liquid & Tabung) 2025, Bulan Oktober 2025							Rp	179.240.400	**Rp**	**2.688.606**
10	Belanja Isi Ulang Oksigen (Liquid & Tabung) 2025, Bulan Desember 2025							Rp	174.581.200	**Rp**	**2.618.718**
11	Belanja Jasa Pelayanan Pasien bulan September Tahun 2025 (Jasa Pelayanan BPJS)							Rp	706.378.523	**Rp**	**6.417.151**
12	Belanja Jasa Pelayanan Pasien bulan September Tahun 2025 (Jasa Pelayanan Umum)							Rp	53.321.382	**Rp**	**1.184.214**
13	Belanja Jasa Pelayanan Pasien bulan Oktober Tahun 2025 (Jasa Pelayanan BPJS)							Rp	388.393.275	**Rp**	**3.533.378**
14	Belanja Jasa Pelayanan Pasien bulan Oktober Tahun 2025 (Jasa Pelayanan Umum)							Rp	48.782.535	**Rp**	**1.094.041**
15	Belanja Jasa Pelayanan Pasien bulan November Tahun 2025 (Jasa Pelayanan BPJS)							Rp	23.660.909	**Rp**	**220.684**
16	Belanja Jasa Pelayanan Pasien bulan November Tahun 2025 (Jasa Pelayanan UMUM)							Rp	70.201.048	**Rp**	**1.458.393**
17	Belanja Jasa Pelayanan Pasien bulan Desember Tahun 2025 (Jasa Pelayanan BPJS)							Rp	641.605.521	Rp	7.454.161
18	Belanja Jasa Pelayanan Pasien Bulan Desember Tahun 2025 (Jasa Pelayanan Umum)							Rp	78.656.573	Rp	2.006.209
19	Belanja Jasa Tenaga Ahli Tim Pengamanan Pembangunan Strategis RSUKD EHD Periode bulan Juni s.d Juli 2025							Rp	1.425.000		
20	Belanja Jasa Tenaga Ahli Pendamping Hukum Pengadaan Pekerjaan RSUKD EHD Periode bulan Agustus s.d Desember 2025							Rp	540.000		
	JUMLAH HUTANG BARANG & JASA									Rp	**3.101.888.473**
	TOTAL KESELURUHAN HUTANG BLUD TAHUN 2025									Rp	**7.528.563.224**

brksyariah

REKENING KORAN

Nomor Rekening	:	1460200007 - RSKJKO ENGKU HAJI DAUD			
Saldo Awal	:	468,236,798.00	Total Kredit	:	0.00
Saldo Akhir	:	0.00	Total Debet	:	468,236,798.00
Periode	:	2025-12-01 s/d 2025-12-31			

NO	TANGGAL	KETERANGAN	D/C	NOMINAL	SALDO	KODE
1	2025-12-10	PLN POSTPAID 183030060125 211914003422202512101152500110 30	D	86,541,279.00	401,695,519.00	100
2	2025-12-10	PLN POSTPAID 183030068977 211914003422202512101156220110 31	D	221,900.00	401,473,619.00	100
3	2025-12-10	PLN POSTPAID 183030261277 211914003422202512101157090110 32	D	9,191,200.00	392,282,419.00	100
4	2025-12-10	210034221210110018 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlanggaman Biaya Langganan Internet RSJK778582	D	8,647,100.00	383,635,319.00	100
5	2025-12-10	210034221210110155 Belanja Tagihan Telepon RSJKO EHD Bulan Desember 2025 SubKeg Penyedia Jasa Ko778583	D	782,700.00	382,852,619.00	100
6	2025-12-10	210034221210110338 Belanja Tagihan Air RSJKO EHD Bulan Desember 2025 SubKeg Penyedia Jasa Komuni778589	D	12,120,300.00	370,732,319.00	100
7	2025-12-10	210034221210110549 elanja Kawat/Faksimili/Internet Biaya Langganan Internet ASTINET RSJKO EHD Bul778590	D	6,665,000.00	364,067,319.00	100
8	2025-12-12	000041 210034221210110654 10808 21053284 Belanja Perjalanan Dinas Biasa SPJ No 025/BUKTIGU6/RSJKOEHD/X	D	370,000.00	363,697,319.00	100
9	2025-12-12	000042 210034221210110654 11738 21353708 Belanja Perjalanan Dinas Biasa SPJ No 028/BUKTIGU6/RSJKOEHD/X	D	370,000.00	363,327,319.00	100
10	2025-12-12	000043 210034221210110654 13490 25114804 Belanja Perjalanan Dinas Biasa SPJ No 024/BUKTIGU6/RSJKOEHD/X	D	370,000.00	362,957,319.00	100
11	2025-12-12	000044 210034221210110654 18773 23027909 Belanja Perjalanan Dinas Biasa SPJ No 023/BUKTIGU6/RSJKOEHD/X	D	370,000.00	362,587,319.00	100
12	2025-12-12	000045 210034221210110654 19540 21626900 Belanja Perjalanan Dinas Biasa SPJ No 027/BUKTIGU6/RSJKOEHD/X	D	370,000.00	362,217,319.00	100
13	2025-12-12	000046 210034221210110654 21697 29987875 Belanja Perjalanan Dinas Biasa SPJ No 026/BUKTIGU6/RSJKOEHD/X	D	370,000.00	361,847,319.00	100

14	2025-12-12	000047 21003422121011065 4 22028 13924316 Belanja Perjalanan Dinas Biasa SPJ No 022/BUKTIGU6/RSJKOEHD/X	D	370,000.00	361,477,319.00	100
15	2025-12-12	000046 21003422121011065 4 26713 12026200 Belanja Perjalanan Dinas Biasa SPJ No 029/BUKTIGU6/RSJKOEHD/X	D	370,000.00	361,107,319.00	100
16	2025-12-12	21003422121011263 3 Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan Biaya Kontribusi Bimtek/ workshop/Pelatihan782983	D	3,250,000.00	357,857,319.00	100
17	2025-12-12	PMN EKATALOG 0195400489893 21003422121120071201 2557	D	3,000,000.00	354,857,319.00	100
18	2025-12-12	PMN EKATALOG 0195400490018 21003422121120076801 2558	D	3,000,000.00	351,857,319.00	100
19	2025-12-12	PMN EKATALOG 0195400489891 21003422121120111201 2559	D	6,000,000.00	345,857,319.00	100
20	2025-12-12	SKN DARI 014602000 07	D	4,180,000.00	341,677,319.00	100
21	2025-12-12	041517659684315	D	220,000.00	341,457,319.00	100
22	2025-12-12	SKN DARI 014602000 07	D	760,000.00	340,697,319.00	100
23	2025-12-12	041512582447230	D	40,000.00	340,657,319.00	100
24	2025-12-12	SKN DARI 014602000 07	D	1,900,000.00	338,757,319.00	100
25	2025-12-12	041587152321732	D	100,000.00	338,657,319.00	100
26	2025-12-12	PMN EKATALOG 0195400502842 21003422121211286801 2504	D	3,024,000.00	335,633,319.00	100
27	2025-12-15	000970 21003422121509371 4 11252 24865840 Belanja Perjalanan Dinas Biasa SPJ No 040/BUKTIGU6/RSJKOEHD/X	D	370,000.00	335,263,319.00	100
28	2025-12-15	000971 21003422121509371 4 14090 19957505 Belanja Perjalanan Dinas Biasa SPJ No 038/BUKTIGU6/RSJKOEHD/X	D	370,000.00	334,893,319.00	100
29	2025-12-15	000972 21003422121509371 4 17624 25950911 Belanja Perjalanan Dinas Biasa SPJ No 039/BUKTIGU6/RSJKOEHD/X	D	370,000.00	334,523,319.00	100
30	2025-12-15	000973 21003422121509371 4 22967 21860122 Belanja Perjalanan Dinas Biasa SPJ No 042/BUKTIGU6/RSJKOEHD/X	D	370,000.00	334,153,319.00	100
31	2025-12-15	000974 21003422121509371 4 26328 26967480 Belanja Perjalanan Dinas Biasa SPJ No 043/BUKTIGU6/RSJKOEHD/X	D	370,000.00	333,783,319.00	100
32	2025-12-15	000975 21003422121509371 4 28509 25740730 Belanja Perjalanan Dinas Biasa SPJ No 041/BUKTIGU6/RSJKOEHD/X	D	370,000.00	333,413,319.00	100
33	2025-12-15	000981 21003422121509514 8 16784 19203280 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota SPJ No 044/BUKTIGU6/RSJKO	D	104,000.00	333,309,319.00	100

34	2025-12-15	000982 21003422121509514S 17168 21879052 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota SPJ No 045/BUKTIGU6/RSJKO	D	104,000.00	333,205,319.00	100
35	2025-12-15	000983 21003422121509514S 17617 25974653 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota SPJ No 045/BUKTIGU6/RSJKO	D	104,000.00	333,101,319.00	100
36	2025-12-15	000984 21003422121509514S 26169 16126993 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota SPJ No 046/BUKTIGU6/RSJKO	D	104,000.00	332,997,319.00	100
37	2025-12-15	000985 21003422121509514S 27530 26827772 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota SPJ No 046/BUKTIGU6/RSJKO	D	104,000.00	332,893,319.00	100
38	2025-12-15	000986 21003422121509514S 29070 15901767 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota SPJ No 047/BUKTIGU6/RSJKO	D	104,000.00	332,789,319.00	100
39	2025-12-15	PMN MSIZ 0021112178441 21003422121510462701289S	D	788,600.00	332,000,719.00	100
40	2025-12-18	PMN EKATALOG 0165100545368 21003422121910472301381 7	D	2,650,000.00	329,350,719.00	100
41	2025-12-30	21003422123007470S Pengembalian S3UP RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2025 820826	D	329,350,719.00	0.00	100

brksyariah

REKENING KORAN

Nomor Rekening	:	1460101234 - RSJKO EHD PENERIMAAN BLUD			
Saldo Awal	:	130,466,634.00	Total Kredit	:	235,891,169.00
Saldo Akhir	:	0.00	Total Debet	:	366,357,823.00
Periode	:	2025-12-01 s/d 2025-12-31			

NO	TANGGAL	KETERANGAN	D/C	NOMINAL	SALDO	KODE
1	2025-12-01	IRJA IRNA DAN APOTEK TGL 28-30 NOVEMBER 2025RSJKO EHD/ARIANSYAH/082283857757	C	4,133,574.00	134,600,208.00	146
2	2025-12-01	SETT ID1462000200010 20251201 BC2 OFF_US_ACQ	C	102,675.00	134,702,883.00	100
3	2025-12-02	SETT ID1462000200010 20251201 BC3 ON_US	C	182,150.00	134,885,033.00	100
4	2025-12-02	IRJA IRNA DAN APOTEK TGL 1 DESEMBER 2025RSJKO EHD/ARIANSYAH/082283857757	C	4,407,155.00	139,292,188.00	146
5	2025-12-02	SETT ID1462000200010 20251202 BC1 OFF_US_ACQ	C	390,000.00	139,682,188.00	100
6	2025-12-02	SETT ID1462000200010 20251201 BC3 OFF_UB_ACQ	C	497,061.00	140,179,249.00	100
7	2025-12-03	SETT ID1462000200010 20251202 BC3 OFF_US_ACQ	C	113,051.00	140,292,300.00	100
8	2025-12-03	21007400120308032S Penerimaan Bulan November Tahun2025 786770	D	134,800,208.00	5,692,092.00	100
9	2025-12-03	IRJA IRNA DAN APOTEK TGL 02 DESEMBER 2025RSJKO EHD CASH SET ARIANSYAH 082283857757	C	850,433.00	6,542,525.00	146
10	2025-12-03	SETT ID1462000200010 20251203 BC2 OFF_US_ACQ	C	95,000.00	6,637,525.00	100
11	2025-12-04	TRANSFER 6274922002430467 11960170715145866586020012040715145 866586123456789010OEMOBILE	C	160,000.00	6,797,525.00	100
12	2025-12-04	SETT ID1462000200010 20251203 BC3 OFF_US_ACQ	C	265,000.00	7,062,525.00	100
13	2025-12-04	IRJA IRNA DAN APOTEK TGL 03 NOVEMBER 2025RSJKO EHD CAH SET ARIANSYAH 082283857757	C	1,214,671.00	8,277,196.00	146
14	2025-12-04	SETT ID1462000200010 20251204 BC1 OFF_US_ACQ	C	184,962.00	8,462,158.00	100
15	2025-12-04	TRANSFER 6274921900611522 11960171525179457790200120415251794577912345678901OOEMOBILE	C	160,000.00	8,622,158.00	100
16	2025-12-04	TRANSFER 6274922001450254 11960171748587875480200120417485878754812345678901OOEMOBILE	C	160,000.00	8,782,158.00	100
17	2025-12-05	SETT ID1462000200010 20251204 BC3 OFF_US_ACQ	C	5,282,117.00	14,064,275.00	100

18	2025-12-05	IRJA IRNA DAN APOTEK TGL 04 DESEMBER 2025RSJKO EHD CASH SET ARIANSYAH 082283957757	C	516,915.00	14,681,190.00	146
19	2025-12-08	LLG 0391 ASURANSI JASARAHARJA, PT0100-SPT-BRI-25120262-004130	C	5,823,379.00	20,404,569.00	100
20	2025-12-08	IRJA IRNA DAN APOTEK TGL 06-07 DESEMBER 2025RSJKO EHD/ARIANSYAH/082283957757	C	3,020,631.00	23,425,200.00	146
21	2025-12-09	IRJA IRNA DAN APOTEK TGL 08 DESEMBER 2025RSJKO EHD CASH SET ARIANSYAH 082283957757	C	3,288,276.00	26,713,476.00	146
22	2025-12-09	BIFAST FR 7027730927 20251209BBBAIDJA010C0965541285541 285	C	869,000.00	27,582,476.00	100
23	2025-12-09	BIFAST FR 7027730927 20251209BBBAIDJA010C0965542414542 414	C	869,000.00	28,451,476.00	100
24	2025-12-10	TRANSFER 6271821303674724 11960171117494054290209121011174940 54291234567890100EMOBILE	C	160,000.00	28,611,476.00	100
25	2025-12-10	IRJA IRNA DAN APOTEK TGL 09 DESEMBER 2025RSJKO EHD CASH SET ARIANSYAH 082283957757	C	2,301,923.00	30,913,399.00	146
26	2025-12-10	PENYALURAN DANA PENSIUNAN 10122025	C	3,646,396.00	34,559,795.00	103
27	2025-12-11	SP2D 21.01/04.0/0017/2/LS/1.02.0.00.0.00.01.0 000/PPR1/12/2025 RSJKO EHD	C	11,201,428.00	45,761,223.00	135
28	2025-12-11	IRJA IRNA DAN APOTEK TGL 10 DESEMBER 2025RSJKO EHD/ARIANSYAH/082283957757	C	4,185,469.00	49,946,692.00	146
29	2025-12-12	LLG 0391 BPJS KETENAGAKERJAAN2512122800760 2512122800760 1460101234	C	16,188,390.00	66,135,082.00	100
30	2025-12-12	IRJA IRNA DAN APOTEK TGL 11 DESEMBER 2025RSJKO EHD CASH SET ARIANSYAH 082283957757	C	3,155,590.00	69,290,672.00	146
31	2025-12-12	SETT ID1462000200010 20251212 BC2 OFF_US_ACQ	C	166,000.00	69,456,672.00	100
32	2025-12-15	IRJA IRNA DAN APOTEK TGL 12-14 DESEMBER 2025RSJKO EHD/ARIANSYAH/082283957757	C	4,417,707.00	73,874,379.00	146
33	2025-12-15	BIFAST FR 1813398648 20251215BNINIDJA010O0241320120320 120	C	56,641.00	73,931,020.00	100
34	2025-12-15	000837/LS/2025 DINKES/BANTUAN PENGOBATAN.	C	77,043,800.00	150,974,820.00	103
35	2025-12-16	TRANSFER 6274922002011477 11960170836437629270200121608364372 8292712345678901 00EMOBILE	C	1,423,000.00	152,397,820.00	100
36	2025-12-16	SETT ID1462000200010 20251215 BC3 OFF_US_ACQ	C	167,765.00	152,565,585.00	100
37	2025-12-16	LLG 0391 BPJS KETENAGAKERJAAN2512162914601 2512162914601 1460101234	C	10,832,820.00	163,398,405.00	100
38	2025-12-16	IRJA IRNA DAN APOTEK TGL 15 DESEMBER 2025RSJKO EHD CASH SET ARIANSYAH 082283957757	C	951,866.00	164,350,271.00	146
39	2025-12-17	2100740012170617 10 Penerimaan Bulan Desember Tahun2025 782279	D	164,350,271.00	0.00	100
40	2025-12-17	SETT ID1462000200010 20251216 BC3 OFF_US_ACQ	C	781,718.00	781,718.00	100

41	2025-12-17	IRJA IRNA DAN APOTEK TGL 16 DESEMBER 2025RSJKO EHD/ARIANSYAH/082283957757	C	1,540,491.00	2,322,209.00	146
42	2025-12-17	BIFAST PR 7772852822 20251217CENAIDJA010O013466749086 7490	C	10,296,500.00	12,618,709.00	100
43	2025-12-16	IRJA IRNA DAN APOTEK TGL 17 DESEMBER 2025RSJKO EHD CASH SET ARIANSYAH 082283957757	C	764,312.00	13,383,021.00	146
44	2025-12-16	SETT ID1462000200010 20251216 BC2 OFF_US_ACQ	C	126,527.00	13,511,548.00	100
45	2025-12-19	SETT ID1462000200010 20251218 BC3 OFF_US_ACQ	C	688,540.00	14,200,088.00	100
46	2025-12-19	SETT ID1462000200010 20251219 BC2 OFF_US_ACQ	C	107,704.00	14,307,792.00	100
47	2025-12-21	TRANSFER 6274922003650888 11960123243811715380200122113338412 59088123456789O1RSJKO EHD	C	10,440.00	14,318,232.00	146
48	2025-12-22	IRJA IRNA DAN APOTEK TGL 19-21 DESEMBER 2025RSJKO EHD CASH SET ARIANSYAH 082283957757	C	8,473,345.00	22,791,577.00	146
49	2025-12-22	SETT ID1462000200010 20251222 BC2 OFF_US_ACQ	C	50,000.00	22,841,577.00	100
50	2025-12-23	SP2D 21.01/04.0/0003761LS/2.08.2.14.0.00.01.0 000/PPR1/12/2025 RSJKO EHD	C	8,000,000.00	30,841,577.00	135
61	2025-12-23	IRJA IRNA DAN APOTEL TGL 22 DESEMBER 2025RSJKO EHD/ARIANSYAH/082283957757	C	497,395.00	31,338,972.00	146
52	2025-12-23	IRJA IRNA DAN APOTEK TGL 18 DESEMBER 2025RSJKO EHD CASH SET ARIANSYAH 082283957757	C	985,782.00	32,324,754.00	146
53	2025-12-23	SETT ID1462000200010 20251223 BC2 OFF_US_ACQ	C	18,710.00	32,343,464.00	100
54	2025-12-23	TRANSFER 6274922002806059 11960171949478657500200122319494786575012345678901OOEMOBILE	C	120,000.00	32,463,464.00	100
55	2025-12-24	SP2D 21.01/04.0/0003821LS/2.08.2.14.0.00.01.0 000/PPR1/12/2025 RSJKO EHD	C	2,800,000.00	35,263,464.00	135
56	2025-12-24	SETT ID1462000200010 20251223 BC3 OFF_US_ACQ	C	495,000.00	35,758,464.00	100
57	2025-12-24	SP2D 21.01/04.0/0003941LS/2.08.2.14.0.00.01.0 000/PPR1/12/2025 RSJKO EHD	C	3,040,001.00	38,798,465.00	135
58	2025-12-24	SP2D 21.01/04.0/0003911LS/2.08.2.14.0.00.01.0 000/PPR1/12/2025 RSJKO EHD	C	4,000,000.00	42,798,465.00	135
59	2025-12-24	SP2D 21.01/04.0/0003931LS/2.08.2.14.0.00.01.0 000/PPR1/12/2025 RSJKO EHD	C	319,790.00	43,118,255.00	135
60	2025-12-24	SP2D 21.01/04.0/0003921LS/2.08.2.14.0.00.01.0 000/PPR1/12/2025 RSJKO EHD	C	138,700.00	43,256,955.00	135
61	2025-12-24	IRJA IRNA DAN APOTEK TGL 23 DES 2025RSJKO EHD CASH SET ARIANSYAH	C	3,718,689.00	46,975,644.00	146
62	2025-12-24	SP2D 21.01/04.0/0004001LS/2.08.2.14.0.00.01.0 000/PPR1/12/2025 RSJKO EHD	C	5,225,070.00	52,201,714.00	135
63	2025-12-25	SETT ID1462000200010 20251224 BC3 OFF_US_ACQ	C	185,912.00	52,387,626.00	100

64	2025-12-26	SETT ID1462000200010 20251225 BC3 OFF_US_ACQ	C	495,142.00	52,882,788.00	100
65	2025-12-26	SETT ID1462000200010 20251226 BC2 OFF_US_ACQ	C	141,714.00	53,024,482.00	100
66	2025-12-27	SETT ID1462000200010 20251227 BC2 OFF_US_ACQ	C	3,388,806.00	56,413,288.00	100
67	2025-12-29	IRJA IRNA DAN APOTEK TGL 24-28 DESEMBER 2025CASH SET ARIANSYAH 082283957757	C	3,396,152.00	59,809,440.00	148
68	2025-12-29	SETT ID1462000200010 20251229 BC2 OFF_US_ACQ	C	77,000.00	59,886,440.00	100
69	2025-12-30	BIFAST FR 901263352905 20251230SSPIDJA010O0269216168 216168	C	119,500.00	60,005,940.00	100
70	2025-12-30	SETT ID1462000200010 20251229 BC3 ON_US	C	131,445.00	60,137,385.00	100
71	2025-12-30	2100740012308140000 Penerimaan Bulan Desember Tahun2025 622620	D	60,137,385.00	0.00	100
72	2025-12-30	SETT ID1462000200010 20251230 BC2 ON_US	C	1,446,000.00	1,446,000.00	100
73	2025-12-30	BIFAST FR 1090019665140 20251230BMRIIDJA010O0227655713 655713	C	309,210.00	1,767,210.00	100
74	2025-12-30	BIFAST FR 6080506948 20251230CENAIDJA010O0222507930507930	C	51,764.00	1,808,974.00	100
75	2025-12-31	IRJA IRNA DAN APOTEK TGL 30 DESEMBER 2025RSJKD EHD CASH SET ARIANSYAH 082283957757	C	5,460,485.00	7,269,459.00	148
76	2025-12-31	KEKURANGAN PX RIZKIRSJKD EHD CASH SET ARIANSYAH 082283957757	C	500.00	7,269,959.00	148
77	2025-12-31	2100740012311161028 Penerimaan Bulan Desember Tahun2025 628356	D	7,269,959.00	0.00	100

RSUD PROV KEPRI (PENERIMAAN) / IDR

Account	: 7030274037
Date	: 01 Dec 2025 - 31 Dec 2025
Opening Balance	: IDR 175,732,048.03
Closing Balance	: IDR 0.00
Total Debit Amount	: IDR 3,710,307,756.03
Total Debit Record	: 4
Total Credit Amount	: IDR 2,535,816,917.00
Total Credit Record	: 42
Branch	: 3300103

Date	FT Number	Description	Currency	Amount	DB	CR	Balance
2025-12-01 00:28:44	FT25335681570NBK	C010000-ASURANSI JIWA BRI(DALTEI INDO	IDR	205,879.00		CR	175,908,721.00
2025-12-03 10:04:44	FT25337080040NBK	BRINEDA BY IDASM	IDR	1,663,040,470.00		CR	1,838,985,709.00
2025-12-03 15:27:48	FT25337F0539NBK	QR 03225 3073 RSUKO EKOKU HAJI DAU	IDR	214,500.00		CR	1,840,784,691.00
2025-12-03 18:09:02	FT25337GKYF2BNK	QR 03225 3087 RSUKO EKOKU HAJI DAU	IDR	938,000.00		CR	1,841,724,691.00
2025-12-04 09:10:58	FT25338GGAI0H	TARIK CEK CB 035270 GEMI WASTITI	IDR	1,841,124,691.00	DB		0.00
2025-12-05 21:02:35	FT25340I1GM4ZBNK	QR 05225 3768 RSUKO EKOKU HAJI DAU	IDR	864,000.00		CR	864,000.00
2025-12-08 10:06:37	FT25342F1SA6YBNK	QRIS 7a51e4b39542 ID20243482284 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	864,000.00		CR	1,728,000.00
2025-12-08 13:27:38	FT25343BDLX6LNK	QR 07225 9762 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	905,422.00		CR	2,633,422.00
2025-12-08 15:27:30	FT25343XXXXBNK	QR 07225 2229 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	304,760.00		CR	2,938,182.00
2025-12-08 15:41:44	FT25343CBNMMZBNK	QR 08225 3023 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	864,000.00		CR	3,802,122.00
2025-12-08 15:41:45	FT25343CNVBQUBNK	QR 08225 3467 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	864,000.00		CR	4,666,122.00
2025-12-08 15:41:35	FT25342QQSGFBNK	QR 08225 2953 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	864,000.00		CR	5,530,122.00
2025-12-08 15:41:35	FT25342CVSDNBNK	QR 08225 1238 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	864,000.00		CR	6,394,122.00
2025-12-08 18:42:19	FT25343WTCH2UBNK	QR 08225 9722 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	864,000.00		CR	7,258,122.00
2025-12-08 18:45:10	FT25343SSS9TBNK	QR 08225 3874 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	864,000.00		CR	8,122,122.00
2025-12-09 10:42:30	FT25343H81K7BNK	QR 08225 9158 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	864,000.00		CR	8,986,122.00
2025-12-09 10:50:50	FT25343WWBQPBNK	QR 09225 0092 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	864,000.00		CR	9,850,122.00
2025-12-09 10:40:51	FT25343X1B3FBNK	QR 08225 9252 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	864,000.00		CR	10,004,122.00
2025-12-09 10:40:51	FT25343X7S7BNK	QR 08225 7064 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	864,000.00		CR	10,868,122.00
2025-12-09 10:43:52	FT25343RRYYBNK	QR 08225 7023 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	864,000.00		CR	11,732,122.00
2025-12-09 10:51:10	FT25343227LWBNK	QR 09225 2133 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	140,000.00		CR	11,872,122.00
2025-12-10 12:28:30	FT25344P0WW5BNK	QR 09225 9658 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	999,000.00		CR	12,791,122.00
2025-12-10 15:08:42	FT25344FOEF0SBNK	QR 10225 8290 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	216,000.00		CR	13,006,122.00
2025-12-10 16:09:43	FT25344YTTD4QNK	QR 10225 9747 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	70,100.00		CR	13,076,222.00
2025-12-10 20:15:51	FT25344D8QZSBNK	QR 10225 3085 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	117,410.00		CR	13,193,632.00
2025-12-10 20:13:51	FT25344QTLMTBNK	QR 10225 4082 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	867,000.00		CR	14,060,632.00
2025-12-10 20:18:42	FT25344F4Z2BBNK	QR 10225 4820 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	62,150.00		CR	14,122,782.00
2025-12-11 12:06:28	FT25345KHF7BNK	QR 20225 3887 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	206,900.00		CR	14,354,112.00
2025-12-11 18:22:48	FT25346CJZPWBNK	QR 11225 3968 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	42,000.00		CR	14,374,112.00
2025-12-12 08:59:21	FT25346LXWGBBNK	QRIS 7a5e4b391860 ID20243482284 RSUKO ENGKU HAJI DAUD Tri Dari - ERUON	IDR	42,000.00		CR	14,416,122.00
2025-12-12 12:34:58	FT25346TBDQUBNK	QR 11225 5842 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	630,000.00		CR	15,044,112.00
2025-12-12 16:41:22	FT25346AVPSMBNK	QR 12225 3126 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	869,000.00		CR	15,913,112.00
2025-12-12 10:59:13	FT25346A7AQVBNK	QR 12225 1058 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	42,000.00		CR	15,955,112.00
2025-12-14 11:42:12	FT25348254360NK	QR 13225 1161 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	295,466.00		CR	16,249,577.00
2025-12-15 20:12:08	FT25348057QUBNK	QRIS 7857847222878 ID20243482284 RSUKO ENGKU HAJI DAUD Tri Dari - ZULFA HUDIYANI	IDR	864,000.00		CR	17,113,577.00
2025-12-15 13:31:19	FT25349095AEHK	C000000-BRIS KESEHATAN Asset DJS KC	IDR	63,438,127.00		CR	80,548,704.00
2025-12-15 10:08:08	FT25348770CKIBNK	QR 15225 5258 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	40,000.00		CR	80,588,704.00
2025-12-16 10:04:45	FT25350ZONNTBNK	QR 10225 1800 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	115,520.00		CR	80,704,224.00
2025-12-17 11:48:10	FT25351ZXGHQBNK	C010000-BRIS KESEHATAN ASET DJS KC	IDR	31,837,100.00		CR	112,541,324.00
2025-12-17 15:02:22	FT25351MUF0BNK	QR 17225 0830 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	289,500.00		CR	112,831,324.00
2025-12-18 11:15:48	FT25352222B0ENK	QR 17225 3968 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	4,817,979.00		CR	117,649,203.00
2025-12-19 08:53:57	FT25353533MWBNK	C000000-ASURANSI JIWA BRI(DALTEI INDO	IDR	1,259,727.00		CR	118,708,930.00
2025-12-19 11:00:39	FT25353G7W2QUBNK	QRIS 7851784f8840 ID20243482284 RSUKO ENGKU HAJI DAUD Tri Dari - YUNITA MAZIA	IDR	216,000.00		CR	118,923,960.00
2025-12-20 12:00:12	FT25354Y1XLYEQNK	QR 18225 3868 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	966,899.00		CR	119,890,859.00
2025-12-20 12:00:13	FT25354Y5R0XQBNK	QR 19225 0001 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	257,580.00		CR	119,944,169.00
2025-12-20 14:14:00	FT25354H6QMVBNK	QR 20225 3679 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	294,857.00		CR	120,078,048.00
2025-12-21 12:08:28	FT25356GXTWFBNK	QR 20225 2019 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	998,000.00		CR	120,996,960.00
2025-12-21 12:06:23	FT25357HHPPBNK	QR 20225 0067 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	138,476.00		CR	121,137,464.00
2025-12-22 10:58:25	FT25358G4SRSQK	C010000-BRIS KESEHATAN ASET DJS KC	IDR	208,938,010.00		CR	330,075,464.00
2025-12-22 10:35:07	FT25358ZLJ6BBK	QR 22225 2468 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	1,263,494.00		CR	331,168,788.10
2025-12-22 18:30:06	FT25359RHCTFUNK	QR 22225 0468 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	514,000.00		CR	331,882,588.00
2025-12-23 20:10:04	FT25357WBXBBNK	C000000-ASURANSI JIWA INHEALTH INDO	IDR	285,000.00		CR	331,967,588.00
2025-12-23 11:38:07	FT25357AMTERBNK	QR 22225 7558 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	54,255.00		CR	332,027,243.00
2025-12-23 11:38:07	FT25357MRBEBNK	QR 22225 7548 RSUKO ENGKU HAJI DAU	IDR	178,734.00		CR	332,206,962.00
2025-12-29 12:42:43	FT25357Z4DQC	TARIK CEK 0030501	IDR	332,206,962.00	DB		0.00

Date	Transaction	Description	Currency	Amount	DB	CR	Balance
2025-12-23 18:52:35	FT25357NVSF0NBNK	QR 251225 2071 BELUD BAGUD HAJI DAU	IDR	700,000.00	CR		700,000.00
2025-12-23 18:52:37	FT25357QVTJNDNK	QR 251225 7785 BELUD BENGKU HAJI DAU	IDR	200,818.00	CR		900,818.00
2025-12-23 18:52:37	FT25357QYHD9CBNK	QR 251225 3943 BELUD BENGKU HAJI DAU	IDR	415,500.00	CR		1,310,318.00
2025-12-23 18:52:38	FT25357QX5HYYBNK	QR 251225 TGAQ BELUD BENGKU HAJI DAU	IDR	109,000.00	CR		1,529,318.00
2025-12-23 18:52:39	FT25357QWLPLCBNK	QR 251225 6613 BELUD BENGKU HAJI DAU	IDR	719,998.00	CR		2,249,316.00
2025-12-25 16:06:12	FT25359PZPXVBNK	QR 251225 8959 BELUD BENGKU HAJI DAU	IDR	475,722.00	CR		1,828,040.00
2025-12-25 16:06:12	FT25359PZPXLYBNK	QR 251225 5478 BELUD BENGKU HAJI DAU	IDR	813,848.00	CR		2,641,888.00
2025-12-26 08:10:46	FT25360RGDT0VBNK	QRIS 7882705145202 ID2024334823487 BELUKO BENGKU HAJI DAUD Tri Dari - VADHILLA SAFITRI	IDR	199,500.00	CR		2,841,388.00
2025-12-29 09:27:17	FT25363MLQMVBNK	QRIS 7882752184705 ID2024334823487 BELUKO BENGKU HAJI DAUD Tri Dari - VADHILLA SAFITRI	IDR	80,000.00 DB			2,761,388.00
2026-01-02 12:57:17	FT25368MTVP8UBNK	BENGKUA BY KLAIM	IDR	1,234,174,790.00		CR	1,235,936,178.00
2026-12-30 13:14:42	FT25361DXWF2D	TARIK CEK 1/2 264902 GOMI NASTITI	IDR	1,236,936,000.00 DB			0.00

RSUD PROV KEPRI (BLUD) / IDR

Account : 7033974929
Date : 01 Dec 2025 - 31 Dec 2025
Opening Balance : IDR 259,548,272.59
Closing Balance : IDR 0.00
Total Debit Amount : IDR 259,537,749.61
Total Debit Record : 4
Total Credit Amount : IDR 51,537.00
Total Credit Record : 3
Branch : 0001 Batam

Date	JT Number	Description	Currency	Amount	DB	CR	Balance
2025-12-02 12:44:13	FT25336YQZ1N5	KEMBALI PAJAK	IDR	20,160.20		CR	259,668,318.79
2025-12-03 15:15:04	FT25338230935	KOREKSI BAGI HASIL ATAS BONUS	IDR	931,531.34	DB		258,462,287.45
2025-12-18 13:02:42	FT25352GL1GF	TARIK CEK CB364527 KEMARI DONA	IDR	258,462,787.43	DB		0.02
2025-12-31 08:13:00	7033974929	Bagi Hasil atas Bonus	IDR	25,892.35		CR	25,892.35
2025-12-31 09:13:00	7033974929	Pajak	IDR	5,728.47	DB		22,163.88
2025-12-31 15:14:00	FT25365KSY1T	KOPENSI PAJAK 7033974929	IDR	5,728.47		CR	27,892.35
2025-12-31 15:14:00	FT25365EOCG8	KOREKSI BAGI HASIL ATAS BONUS	IDR	25,892.35	DB		0.00

Tanggal Cetak : 31/12/25

No. Rekening : 1460112345 | Saldo Rp : 16
Nama Nasabah : [illegible] | Tabel : .00 %
Kantor : [illegible] | Bunga : .00 %
Alamat : [illegible] | Pajak : .00 %
Telepon : .00 | Tanggal Buka : 14/06/21
Periode Tgl. 1 12/12/25 s/d 31/12/25 | Tanggal Akhir : 09/09/30

SALDO AWAL 955,671,904.58

31/12/25	0413809330329999	[illegible]	CR	427,750.00	956,416,154.10
31/12/25	0000123986	SETOR TUNAI [illegible] 1460112345	CR	388,631,232.00	642,822,922.10
31/12/25	0413632513300123	[illegible]	CR	1,693,968.00	636,132,954.10
31/12/25	0000123457	SETOR TUNAI [illegible] 1460112345	CR	456,953,264.00	179,179,690.10
31/12/25	0413263025123	[illegible]	CR	6,989,136.00	172,190,554.10
31/12/25	[illegible]	[illegible]	CR	10,672,201.00	182,867,595.10
31/12/25	0000123456	Penarikan Bulan Desember	CR	7,369,959.00	190,237,554.10

SALDO AKHIR 190,237,554.10

Hormat Kami,

Pihak Bank

Dicetak pada 31/12/25 oleh [illegible]

Apabila saldo di buku rekening ini tidak sesuai dengan catatan Anda, harap segera menghubungi kami untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

[illegible]

BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TETAP

[illegible]

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam belas bulan [illegible] tahun Dua Ribu Dua puluh lima bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan Rekonsiliasi Aset Tetap Triwulan IV antara Bidang Aset dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Aset Tetap pada Perangkat Daerah Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan hasil sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL PER 1 OKTOBER 2025	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KELUAR	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	Kolom (3+4+5-6)	Kolom (3+4+5-6)	8
1.3.	ASET TETAP	330.738.749.320,00	63.113.260.300,00	3.737.970.448,10	69.790.050,26	32.757.934.548,00	736.809.163.378,00	
1.3.1	TANAH	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	LRA - MUTASI TAMBAH - Mutasi SNCI dari Biro Kesejahteraan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST No. 1017/BA-KESRA/XI/2025 Tanggal 25 November 2025 sebesar Rp.140.274.195,-
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MUTASI TAMBAH - Bekas dari Belanja Modal dan Hibah sebesar Rp.33.600.000,- MUTASI KELUAR : - Bekas ke Aset Pemerintah sebesar Rp.74.507.158,- - Belanja Modal Bapak Erik S Tahun 2024 sebesar Rp.40.890.000,- - Penghapusan BMD berdasarkan SK Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 sebesar Rp.39.600.000,-
1.3.3	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	MUTAN TAMBAH - Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp.368.979.771,- - Mutasi BMD dari Biro Kesejahteraan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST No. 1058/BA-KESRA/XI/2025 Tanggal 21 November 2025 sebesar Rp.7.184.495.976,-
1.3.4	ASET TETAP LAINNYA	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	LRA
1.3.5	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	[illegible]					[illegible]	MUTASI KELUAR - Aset ke 498 5 sebesar Rp.123.540.000,-
1.3.6	[illegible]	[illegible]					[illegible]	MUTASI TAMBAH : - Pekerjaan dari 498 5 sebesar Rp.13.175.434.800,-
1.5.	ASET LAINNYA	28.972.993.918,04	200.000.000,00	-	698.605.601,00	(369.560.600,00)	31.090.926.919,00	
1.5.2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	[illegible]					[illegible]	
1.5.3	ASET TIDAK BERWUJUD	[illegible]					[illegible]	
1.5.4	ASET LAIN LAIN	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	MUTASI KELUAR - Bekas ke 498 5 sebesar Rp.10.800.000,- - Pekerjaan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.249.930.000,- - Penghapusan BMD berdasarkan SK Nomor 1290 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 sebesar Rp.24.672.000,- - Penghapusan BMD berdasarkan SK Nomor 1027 Tahun 2025, Tanggal 23 September 2025 sebesar Rp.344.803.600,-
	ASET DIGUNAKAN MASYARAKAT	1.301.537.057,00	-	-	-	-	1.301.537.057,00	
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	[illegible]					[illegible]	
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	[illegible]					[illegible]	
1.3.4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN							
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	[illegible]					[illegible]	

[illegible]

KEPALA BIDANG ASET DAERAH

[illegible]

[illegible]

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

[illegible]

[illegible]

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

[illegible]

BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TETAP

[illegible]

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Enam Belas** bulan **Januari** tahun **Dua ribu dua puluh lima** bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan **Rekonsiliasi Aset Tetap** bersama di antara Bunsik Sakti Jaya dan Kelengkapsigan Obat Bagus Haji Duad Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL 2024	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	MUTASI TAMBAH	MUTASI KELUAR	JUMLAH PENYESUAIAN ASET	SALDO AKHIR	KETERANGAN
1.3.	ASET TETAP	170.813.581.700,00	53.857.671.800,00	8.947.958.948,00	116.700.000,00	57.602.782.148,00	736.496.583.876,00	
1.3.1	Tanah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DK MUTASI TAMBAH - Mutasi BMD dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST No.1857/BA-KEU/PERSE/XI/2025 Tanggal 10 November 2025 sebesar Rp.144.274.370,-
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MUTASI TAMBAH - Koreksi dari Belanja Aset Lain-lain BLUD sebesar Rp.143.336.000, MUTASI KELUAR - Koreksi ke Aset Eksklusemustakin sebesar Rp.26.960.000,- - Belanja Tanda Nyaw KIB B Tahun 2024 sebesar Rp.40.480.900,- - Penghapusan BMD berdasarkan SK Nomor 1281 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 sebesar Rp.81.808.000
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MUTASI TAMBAH - Belanja Jasa Konsultan Pengawasan sebesar Rp.969.975.372,- - Belanja Jasa Konsultan Review DED 8 Unit sebesar Rp.55.000.000,- - Mutasi BMD dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST No. 1858/BA-KEU/PERSE/XI/2025 Tanggal 10 November 2025 sebesar Rp.7.006.975.976,-
1.3.4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MUTASI TAMBAH - Koreksi dari Belanja Aset Lain-lain BLUD sebesar Rp.26.333.000,-
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	101.700.400,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1.3.6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1.5.	ASET LAINNYA	24.070.083.619,00	320.719.000,00	[illegible]	698.286.408,00	(360.565.928,00)	25.790.516.039,00	
1.5.2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1.5.3	ASET TIDAK BERWUJUD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1.5.4	ASET LAIN-LAIN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MUTASI KELUAR - Koreksi ke KIB B (BELANJA BLUD) sebesar Rp.143.286.000, - Koreksi ke KIB D (BELANJA BLUD) sebesar Rp.28.033.000, - Koreksi ke Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.179.415.000, - Penghapusan BMD berdasarkan SK Nomor 1283 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 sebesar Rp.28.672.000,- - Penghapusan BMD berdasarkan SK Nomor 1321 Tahun 2025, Tanggal 23 September 2025 sebesar Rp.644.893.408
	ASET DEKONSOLIDASIKAN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1.5.2	PERALATAN DAN MESIN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MUTASI TAMBAH - Koreksi dari KIB B sebesar Rp.26.960.000,-
1.5.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1.5.4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1.5.5	ASET TETAP LAINNYA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENGELOLA BARANG PEMBANTU

[illegible]

RIKI DITA WIDORI, S. Si

NIP. [illegible]

BENDAHARA PENGELUARAN KELENGKAPSIGAN OBAT BAGUS HAJI DUAD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

[illegible]

ANDRI HANTO

NIP. [illegible]

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

[illegible]

BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TETAP

[illegible]

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Enam belas** bulan **Januari** tahun **Dua ribu dua puluh enam**, bertempat di Ruang Sidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan **Rekonsiliasi Aset Tetap Tahun 2025** antara Bidang Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau dengan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan hasil sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2025	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (1 Jan s/d 31 Des 2025)	MUTASI TAMBAH (1 Jan s/d 31 Des 2025)	MUTASI KELUAR (1 Jan s/d 31 Des 2025)	JUMLAH PENYUSUTAN ASET (1 Jan s/d 31 Des 2025)	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2025	KETERANGAN
	1	2	3	4	5	7=(3+4)-5	8=(2+7)	10
1.3	ASET TETAP	172.582.991.780,00	54.333.333.800,00	10.381.806.340,00	633.890.000,00	64.333.592.100,00	236.896.583.870,00	
1.3.1	TANAH	[illegible]		340.274.100,00		181.331.100,00	3.340.274.100,00	Ket : MUTASI TAMBAH - Mutasi BMD dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST No 1853/BA-MB/PENGK/XI/2025 Tanggal 03 November 2025 sebesar Rp.340.274.100,-
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MUTASI TAMBAH : - Bybkn dari Belanja Aset Lain-lain (Belanja Modal 86103) sebesar Rp 853.383.000,- - Hibah dari Kementerian Kesehatan berdasarkan BAST No BN 01.06/C1/ SIGA /2024 Tanggal 23 Desember 2024 sebesar Rp 1.910.000.000,- MUTASI KELUAR : - Bybkn ke Aset Ekstrakomptable sebesar Rp 33.990.000, - Pembayaran Belanja Tanah Bayar Hibah Tahun 2024 sebesar Rp.546.540.000, - Penghapusan BMD berdasarkan SK Nomor 1290 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 sebesar Rp 99.868.000
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MUTASI TAMBAH - Belanja jasa Konsultan Pengawasan sebesar Rp 969.978.775,- - Belanja jasa Konsultan Review DED (BLUD sebesar Rp 95.000.000,- - Mutasi BMD dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST No 1858/BA-MB/PENGK/XI/2025 Tanggal 20 November 2025 sebesar Rp.7.166.475.376,-
1.3.4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	MUTASI TAMBAH - Hibah dari Belanja Aset Lain-lain BLUD sebesar Rp.28.053.000,-
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	181.700.000,00					181.700.000,00	
1.3.6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	34.870.000,00					34.870.000,00	
1.5	**ASET LAINNYA**	**26.009.181.813,00**	**479.304.000,00**	-	**849.540.000,00**	**(969.563.000,00)**	**25.709.516.519,00**	
1.5.2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-					-	
1.5.3	ASET TIDAK BERWUJUD	[illegible]					[illegible]	
1.5.9	ASET LAIN-LAIN	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MUTASI KELUAR : - Bybkn ke KIB D sebesar Rp.777.146.900,- - Bybkn ke KIB G (BELANJA BLUD) sebesar Rp.28.053.900,- - Bybkn ke Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.179.515.000,- - Penghapusan BMD berdasarkan SK Nomor 1290 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 sebesar Rp.24.673.000,- - Penghapusan BMD berdasarkan SK Nomor 1017 Tahun 2025, Tanggal 23 September 2025 sebesar Rp.344.833.500
	ASET EKSTRAKOMPTABLE	**1.357.727.807,00**		**33.990.000,00**	-	**33.990.000,00**	**1.391.717.057,00**	
1.5.2	PERALATAN DAN MESIN	[illegible]		[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	MUTASI TAMBAH - Bybkn dari KIB B sebesar Rp.33.990.000,-
1.5.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	[illegible]					[illegible]	
1.5.4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN							
1.5.5	ASET TETAP LAINNYA	[illegible]					[illegible]	

[illegible]

PENGELOLA BARANG PEMBANTU

[illegible]

NIP [illegible]

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

[illegible]

NIP [illegible]

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KESEHATAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3
Pusat Dompak Sen Dang Makmur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Pos-el: dinkes@kepriprov.go.id Laman: dinkes.kepriprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 058/ BA-HB/PERLK-XI/2025

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : **Dr. MOH. BISRI, SKM, M.Kes**
   NIP : 19710109 199503 1 003
   Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
   Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung C2 Lantai 2 dan 3 Dompak Laut Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **dr. ASEP GUNTURSAPARI, MARS**
   NIP : 19770209 200502 1 009
   Jabatan : Direktur RSJKO Engku Haji Daud
   Alamat : Jl. Indun Suri – Simpang Bintang Nomor 1 Tanjung Uban, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima Barang Milik Daerah (BMD) dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa bangunan RSJKO Engku Haji Daud sebagaimana terlampir

Pasal 2

(1) **PIHAK KEDUA** menerima sepenuhnya dari **PIHAK KESATU** buku yang telah diserahkan dimaksud dalam pasal 1
(2) **PIHAK KEDUA** akan menggunakan dokumen tersebut untuk mempang pelaksanaan pekerjaan RSJKO Engku Haji Daud

Pasal 3

Setelah ditanda tanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka berakib status penggunaan tersebut kepada **PIHAK KEDUA** dan segala hal terkait dalam penatausahaan barang tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Berita Acara Serah Terima ini, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh Para Pihak.

Tanjungpinang, 28 November 2025

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	**DIREKTUR RSJKO ENGKU HAJI DAUD**
MOH. BISRI, SKM, M. Kes	**dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS**
NIP. 19710109 199503 1 001	NIP. 19770209 200502 1 003

DAFTAR INVENTARIS PENGELOLA BARANG
ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN

PEMERINTAH

Kode Barang	Nama Barang											

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KESEHATAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3
Pulau Dompak Seri Daru Makmur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Pos-el: dinkes@kepriprov.go.id Laman: dinkes.kepriprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 15 / BA-HB/PERI.K/ XI/2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. MOH. BISRI, SKM, M.Kes**
   NIP : 19710109 199503 1 003
   Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
   Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung C2 Lantai 2 dan 3 Dompak Laut Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **dr. ASEP GUNTURSAPARI, MARS**
   NIP : 19770209 200502 1 003
   Jabatan : Direktur RSIKO Engku Haji Daud
   Alamat : Jl. Indun Suri Simpang Busung Nomor 1 Tanjung Uban selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima Barang Milik Daerah (BMD) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa bangunan RSIKO Engku Haji Daud sebagaimana terlampir.

Pasal 2

(1) **PIHAK KEDUA** menerima sepenuhnya dari **PIHAK KESATU** baku yang telah diserahkan dimaksud dalam pasal 1
(2) **PIHAK KEDUA** akan menggunakan dokumen tersebut untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan RSIKO Engku Haji Daud

Pasal 3

Setelah ditanda tanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka beralih status penggunaan tersebut kepada **PIHAK KEDUA** dan segala hal terkait dalam pemanfaatan barang tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA.**

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Berita Acara Serah Terima ini, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh Para Pihak.

Tanjungpinang, 20 November 2025

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	**DIREKTUR RSUKO ENGKU HAJI DAUD**
MOH. IBNU, SKM, M. Kes	**dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS**
NIP. 19710109 199503 1 001	NIP. 19770209 200502 1 003

DAFTAR BMN PADA PENGGUNA BARANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PERIODE TW I

Kode Barang	Nama Barang	Merek	Nomor Seri	Identitas Tambahan Barang	Spesifikasi Barang	Jumlah	Satuan	Tahun Perolehan (Tp)	Nilai Perolehan (Rp)	Lokasi Barang	Status Penggunaan	Status Barang

[illegible]

DAFTAR SATUAN HARGA UNIK BARANG
RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT PROVINSI NUSA DUSO
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kode Barang	Register	Merek / Jenis / Tipe Barang	Spesifikasi Barang			Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Beli / Pembuatan	Umur Ekonomis (Masa Manfaat)	Satuan	Kapasitas / Isi / Ukuran	Jumlah		Harga Satuan				Jumlah		NST
				Merek / Type	Ukuran (Dimensi / Diameter / Panjang / Lebar)	Bahan						Barang	Harga	Barang		Harga		Barang	Harga	
														Barang		Barang				
1		0001	[illegible]	[illegible]			[illegible]	2023		UNIT	1					1	Rp [illegible]	1	Rp [illegible]	
2		0001	[illegible]				[illegible]	2023		UNIT	1					1	Rp [illegible]	1	Rp [illegible]	
3		0001	[illegible]				[illegible]	2023		UNIT	1					1	Rp [illegible]	1	Rp [illegible]	
4		0001	[illegible]				[illegible]	2023		UNIT	1					1	Rp [illegible]	1	Rp [illegible]	
5		0001	[illegible]				[illegible]	2023		UNIT	1					1	Rp [illegible]	1	Rp [illegible]	
6		0001	[illegible]				[illegible]	2023		UNIT	1					1	Rp [illegible]	1	Rp [illegible]	
7		0001	[illegible]				[illegible]	2023		UNIT	1					1	Rp [illegible]	1	Rp [illegible]	
8		0001	[illegible]				[illegible]	2023		UNIT	1					1	Rp [illegible]	1	Rp [illegible]	
9		0001	[illegible]				[illegible]	2023		UNIT	1					1	Rp [illegible]	1	Rp [illegible]	
10		0001	[illegible]				[illegible]	2023		UNIT	1					1	Rp [illegible]	1	Rp [illegible]	
11		0001	[illegible]				[illegible]	2023		UNIT	1					1	Rp [illegible]	1	Rp [illegible]	
12		0001	[illegible]				[illegible]	2023		UNIT	1					1	Rp [illegible]	1	Rp [illegible]	

Tanjung Enim, 01 Januari 2025

PENGURUS BARANG PENGGUNA

[illegible]

NIP. [illegible]

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BIRO KESEJAHTERAAN DAERAH

REKAPITULASI DAFTAR MUTASI BARANG MILIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025

BKPD : PUSAT LAYANAN DATA DAN INFORMASI TUNGGAL OBAT RASIONAL DAERAH
PROVINSI : KEPULAUAN RIAU

NO URUT	GOL	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	KEADAAN AWAL PER 1 JANUARI 2025		MUTASI PENAMBAHAN SELAMA 1 JANUARI 2025 S.D. 31 DESEMBER 2025				KEADAAN AKHIR PER 31 DESEMBER 2025		KETR
						BERKURANG		BERTAMBAH				
				JUMLAH BARANG	HARGA BARANG (Rp)	JUMLAH BARANG	HARGA BARANG (Rp)	JUMLAH BARANG	HARGA BARANG (Rp)	JUMLAH BARANG	HARGA BARANG (Rp)	
1	1	1	TANAH									
		1	Tanah	1	2,500,000,000					1	2,500,000,000	
			Jumlah (1)	1	2,500,000,000	0	-	1	343,274,100	1	2,843,274,100	Apabila terdapat selisih lebih, adalah hasil revisi penatausahaan Rp 343,274,100
2	2		PERALATAN DAN MESIN									
		2	a. Alat Besar Darat	50	1,103,396,000					50	1,103,396,000	
		3	b. Alat Besar Apung	24	3,830,310,000					24	3,830,310,000	
		4	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur	115	891,301,255					115	891,301,255	
		5	d. Alat Pertanian / Perkebunan	69	1,009,167,000					69	1,009,167,000	
		6	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,995	21,099,369,213			117	1,991,256,000	2,023	23,090,625,213	
		7	f. Alat Studio dan Komunikasi	81	2,804,491,500					81	2,804,491,500	
		8	g. Alat-alat Kedokteran	1,115	84,823,176,842			78	9,632,791,000	1,193	94,454,967,842	
		9	h. Alat-alat Laboratorium	140	30,473,689,509					140	30,473,689,509	
		10	i. Alat-alat Persenjataan	1	1,048,000,000					1	1,048,000,000	
		11	j. Komputer	911	4,065,578,486			28	247,852,800	939	4,313,431,286	
		12	k. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemeliharaan	4	8,000,000			2	3,177,200,000	6	3,185,200,000	
		13	l. Alat Keamanan dan Keja	2	45,000,000					2	45,000,000	
		14	m. Peralatan olahraga	5	36,081,342					5	36,081,342	
			Jumlah (2)	3,033	150,836,358,846		11,127,764,515	334	15,764,649,900	4,282	168,474,020,670	apabila terdapat selisih lebih (kurang) antara Rp 343,274,100, yaitu Rp 343,274,100 (selisih lebih) dan Rp 0 (selisih kurang) dengan Rp 343,274,100, terdiri dari penambahan mutasi Rp 1,210,000,000

3	3		ASET LAIN-LAIN						V	34,000,619,272	46	80,984,141,272	
		11	a. Bangunan Gedung	36	46,916,621,860						0	-	
			b. Bangunan Monumen	0									
			Jumlah (III)	38	46,916,621,860	0	-		7	41,173,619,272	48	80,984,141,272	
4	4		ASET DALAM PROSES PEMBANGUNAN										
		13	a. Jalan dan Jembatan	5	887,149,000						5	887,149,000	
		14	b. Bangunan Air Irigasi	7	711,429,800						7	711,429,800	
		16	c. Instalasi	10	847,799,492				3	6,191,663,000	13	7,039,462,492	
		18	d. Jaringan	11	4,467,073,700						11	4,467,073,700	
			Jumlah (IV)	34	6,913,653,000	0	-		3	6,191,663,000	34	13,913,969,000	
5	5		ASET TETAP LAINNYA										
		17	a. Buku Perpustakaan	123	28,540,000						126	28,540,000	
		18	b. Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	3	4,331,000						3	4,331,000	
		19	c. Aset Tetap Lainnya	2	100,429,000						2	100,429,000	
			Jumlah (V)	128	133,300,000	0	-		0	-	131	133,300,000	
6	6		KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN										
		20		1	30,000,000						1	30,000,000	
			Jumlah (VI)	1	30,000,000	0	-		0	-	1	30,000,000	
7	7		ASET LAINNYA										
		21	a. Aset Lainnya	4	1,467,000,000						4	1,467,000,000	
		23	b. Aset Kondisi Rusak Berat / Hilang / Lainnya	17	10,053,336,140		144,555,500			14,044,444,575	77	24,331,225,215	
		25	c. Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain	0							0	-	
		24	d. Aset Tidak Berwujud	1	12,000,000		12,000,000				1	-	
			Jumlah (VII)	17	13,532,336,140	0	156,555,500		0	14,044,444,575	82	25,798,225,215	

			BARANG HORMA DAN BATIK										
		25	a. Pecahan dan Kayu	1,000	1,351,977,616		8,200,845		33,992,000	4,000	1,375,707,057		
		26	b. Cetting dan Lampiran	12	4,200,000					12	4,200,000		
		27	c. Alat Tulis Lainnya	1	7,800,000					1	7,800,000		
			Jumlah (B)	4,015	1,365,727,616		8,200,845	0	33,992,000	4,043	1,387,707,057		
JUMLAH (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)				9,242	181,833,800,964	9	14,622,830,737	344	73,977,348,787	9,604	270,434,980,454		

Mengetahui,

Yanjung Utan, 31 Desember 2015

Pengurus Barang Pembantu

RINI DWITA HENDRIYANI, S.Sos.
NIP 19680130 200012 1 005

REKAPITULASI
INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH APBD +BLUD
RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TA 2025

No	Golongan	Kode Golongan	Jumlah	
1.	KIB A : Tanah	01	Rp	540.274.100
2.	KIB B : Peralatan dan Mesin	02	Rp	17.010.414.800
3.	KIB C : Bangunan Gedung	03	Rp	41.173.095.248
4.	KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan	04	Rp	6.191.063.000
5.	KIB E : Aset Tetap Lainnya	05	Rp	-
6.	KIB F : Konstruksi Dalam Pekerjaan	06	Rp	-
	TOTAL		Rp	64.914.847.148

Tanjung Uban, Desember 2025

Mengetahui
Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat
Engku Haji Daud

dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS
NIP. 19770209 200502 1 003

Pengurus Barang Pembantu

RIKI OKTA HENDRI, S.Gz
NIP. 19951010 202012 1 005

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)
A. TANAH
TAHUN 2025

PROPINSI : KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKE HAJI DAUD

NO	GAMBAR / FOTO	JENIS / NAMA BARANG	LUAS M2	TAHUN PENGADAAN	LETAK / ALAMAT	SERTIFIKAT		HARGA RP	NO SP2D	NO KONTRAK	NAMA KEGIATAN	NAMA PIHAK KETIGA
						TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		TANAH BANGUNAN RUMAH SAKIT	00.00	2006	RSUD TG. UBAN			162.082.230,00		1857/BA-HB/PERLK/X/2025	HIBAH DINKES PROVINSI TA 2025	DINKES PROV
2		TANAH BANGUNAN TEMPAT KERJA LAINNYA (dst)	00.00	2006	LAHAN CUT & FILL			378.191.870,00		1857/BA-HB/PERLK/X/2025	HIBAH DINKES PROVINSI TA 2025	DINKES PROV

Tanjung Uban, Desember 2025

Mengetahui
Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat
Engku Haji Daud

dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS
NIP. 19770209 200502 1 003

Pengurus Barang Pembantu

RIKI OKTA HENDRI, S.Gz
NIP. 19951010 202012 1 005

1																		
2																		
17																		
18																		
21																		
22																		
23																		
24																		

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)
C. GEDUNG DAN BANGUNAN
TAHUN 2025

PROPINSI : KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	GAMBAR / FOTO	NAMA BANGUNAN	KONSTRUKSI		LUAS LANTAI (M)	LETAK / ALAMAT	DOKUMEN GEDUNG		RIWAYAT TANAH GEDUNG		HARGA KONTRAK	JUMLAH HARGA	TAHUN PEMBELIAN	NO SPJD	MUTASI/KET	NAMA KEGIATAN	NAMA PENANGGUNG JAWAB
			BETON	BERTINGKAT			TANGGAL	NOMOR	PEROLEHAN/ASAL	PENGGUNAAN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		BANGUNAN GEDUNG KANTOR				JALAN [illegible]					6.588.328.000	6.588.328.000	APBD 2025	[illegible]	[illegible]	PEMBAYARAN UANG MUKA (0% BIAYA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR	PT. MITRA MULYO INDONESIA
2		BANGUNAN GEDUNG KANTOR				JALAN [illegible]					6.588.328.000,00	6.588.328.000,00	APBD 2025	[illegible]	[illegible]	PEMBAYARAN TERMIN 1 SEBESAR 25% BIAYA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR	PT. MITRA MULYO INDONESIA
3		BANGUNAN GEDUNG KANTOR				JALAN [illegible]					6.588.328.000,00	6.588.328.000,00	APBD 2025	[illegible]	[illegible]	PEMBAYARAN TERMIN 1 SEBESAR 25% BIAYA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR	PT. MITRA MULYO INDONESIA
4		BANGUNAN GEDUNG KANTOR				JALAN [illegible]					6.588.328.000,00	6.588.328.000,00	APBD 2025	[illegible] 03/12/2025	[illegible]	PEMBAYARAN TERMIN 1 SEBESAR 25% BIAYA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR	PT. MITRA MULYO INDONESIA
5		BANGUNAN GEDUNG KANTOR				JALAN [illegible]					[illegible]	[illegible]	APBD 2025	[illegible]	[illegible]	PEMBAYARAN TERMIN 1 SEBESAR 25% DAN TERMIN 2 SEBESAR 0% BIAYA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR	PT. MITRA MULYO INDONESIA
6		JASA KONSULTAN PENGAWASAN				JALAN [illegible]				[illegible]		[illegible]	APBD 2025	[illegible] 03/12/2025	[illegible]	PEMBAYARAN TERMIN 100% BIAYA JASA KONSULTASI PENGAWASAN	PT. BINTAN MINDOPO
7		JASA KONSULTAN REVIEW DED				JALAN [illegible]			15.000.000			95.000.000	BLUD 2025	[illegible]	[illegible]	BIAYA KONSULTASI REVIEW DED GEDUNG RAWATAN TNGK TAHAP II	CV. YUNA JAYA CONSULTANT

NO	GAMBAR	NAMA BARANG	KONSTRUKSI		LUAS LANTAI M2	LETAK ALAMAT	DOKUMEN GEDUNG		BUKU LAIN KONSTRUKSI		HARGA PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	TAHUN PEMBELIAN	STATUS	NO KONTRAK	NAMA REKANAN	NOMOR PSIAK KETUA
			BETON	BUKAN BETON			TANGGAL	NOMOR	PERENCANAAN	PENGAWASAN							
8		BANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM				TG. URAN KAB. BINTAN					621.674.999	621.674.999	RSBAM DINKES PROV 2025		090/RSA-04/PERJA/XI/2025	GEDUNG DAN BANGUNAN DINKES PROV	DINKES PROV
9		BANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM				TANJUNG URAN					1.265.349.917,00	1.265.349.917,00	RSBAM DINKES PROV 2025		090/RSA-08/PERJA/XI/2025	GEDUNG DAN BANGUNAN DINKES PROV	DINKES PROV
10		BANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM				TANJUNG URAN					4.161.724.710,00	4.161.724.710,00	RSBAM DINKES PROV 2025		090/RSA-08/PERJA/XI/2025	GEDUNG DAN BANGUNAN DINKES PROV	DINKES PROV
11		RUMAH NEGARA GOLONGAN III TIPE II LAIN-LAIN				KAB. BINTAN					237.654.290,00	237.654.290,00	RSBAM DINKES PROV 2025		090/RSA-08/PERJA/XI/2025	GEDUNG DAN BANGUNAN DINKES PROV	DINKES PROV
12		RUMAH NEGARA GOLONGAN III TIPE II LAIN-LAIN				TG. URAN KAB BINTAN					207.927.000,00	207.927.000,00	RSBAM DINKES PROV 2025		090/RSA-08/PERJA/XI/2025	GEDUNG DAN BANGUNAN DINKES PROV	DINKES PROV
13		RUMAH NEGARA GOLONGAN III TIPE II LAIN-LAIN				TG. URAN KAB. BINTAN					984.450.400,00	984.450.400,00	RSBAM DINKES PROV 2025		090/RSA-08/PERJA/XI/2025	GEDUNG DAN BANGUNAN DINKES PROV	DINKES PROV

Mengetahui
Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat
Engku Haji Daud

dr. AMPP GUNTUR SAPARI, MARS
NIP. 19770209 200502 1 003

Tanjung Uban, Desember 2025

Pengurus Barang Pembantu

RISKI OKTA HENDRI, S.Ap
NIP. 19951010 202012 1 009

1		WATER TREATMENT PLANT (WTP)	GRIYA FLAMBOYAN			APBD 2025			3.272.500.000,00	3.272.500.000,00	21.10.04.10004663 5.1.02.0.00.0.00.02 0001/PR/10/2025	SP.32/RSIK.O-DED/2025 TGL 12/02/2025	BELANJA MODAL INSTALASI LAIN - WTP	PT. MAKMUR MANDIRI MEDIKA
2		IPAL	BELAKANG RUANG ICU			APBD 2025			2.840.540.000,00	2.840.540.000,00	21.10.04.10004665 5.1.02.0.00.0.00.02 0003/PR/10/2025	SP.31/RSIKO-DED/2025 TGL 12/02/2025	BELANJA MODAL INSTALASI LAIN - IPAL	PT. DEVA DISTRIBUSINDO RAYA
3		INSTALASI AIR BERSIH	GRIYA FLAMBOYAN			BLUD 2025			28.023.000,00	28.023.000,00	04/SPJD/1.02.9/ 03/2025 tanggal 16 Juli 2025	PT. [illegible]	BELANJA MODAL INSTALASI AIR BERSIH OP	CV. HARJAYA MAJU SEJAHTERA

Mengetahui
Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat
Kepala Pihak Dua

dr. [illegible]

Tabang, [illegible] Desember 2025
Pengurus Barang Pengguna

[illegible]



NIHIL

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)
F. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
TAHUN 2025

PROPENSI : KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD

NO	GAMBAR / FOTO	JENIS / NAMA BARANG	KONSTRUKSI BANGUNAN		LETAK / LOKASI ALAMAT	TGL/BLN/THN MULAI	TAHUN PEMBELIAN	NILAI KONTRAK	NO SPJD	NO KONTRAK	NAMA KEGIATAN	NAMA PIHAK KETIGA	KETERANGAN
			BERTINGKAT / TIDAK	BETON / TIDAK									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

NIHIL

Mengetahui
Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat
Engku Haji Daud

dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS
NIP. 19770209 200502 1 003

Tanjung Uban, Desember 2025

Pengurus Barang Pembantu

RIKI OKTA HENDRI, S.Kom
NIP. 19951010 202012 1 005

SMK Negeri 1 Batam

LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SMK N 1 BATAM TAHUN ANGGARAN 2025

(AUDITED)



Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
SMK Negeri 1 Batam
Jl. Prof. Dr. Hamka No. 1 Kibing, Batu Aji Batam
Telp: 0778-365909, Email: humas@smkn1batam.sch.id, Website: www.smkn1batam.sch.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR LAMPIRAN v
KATA PENGANTAR vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB vii
LAPORAN KEUANGAN
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
C. NERACA
D. LAPORAN OPERASIONAL
E. LAPORAN ARUS KAS
F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 2
1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Batam 3
1.4 Periode Pelaporan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Batam 3
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 3

BAB II PROFIL BLUD SMK NEGERI 1 BATAM
2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 1 Batam 5
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 1 Batam 6
2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 1 Batam.....7

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2024

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025 8
3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai dalam Pencapaian Target Realisasi 9

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Akuntansi 11
4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan 11
4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 11
4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 11
4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan 12
4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja 12
4.7 Kebijakan Akuntansi Kas 13
4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan 13
4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap 13
4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban 14

BAB V RINCIAN POS POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 Penjelasan Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran 15
5.2 Penjelasan Pos Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 19
5.3 Neraca 19
5.4 Laporan Operasional 24
5.5 Laporan Arus Kas 27
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas 33

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi 35
6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas 35

BAB VII PENUTUP 36

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
Tabel 2	Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target
Tabel 3	Pendapatan – LRA
Tabel 4	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan
Tabel 5	Pendapatan BLUD dari Hibah
Tabel 6	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain
Tabel 7	Pendapatan BLUD dari APBD
Tabel 8	Pendapatan BLUD dari Lain lain Pendapatan BLUD yang sah
Tabel 9	Belanja Pegawai BLUD
Tabel 10	Belanja Barang dan Jasa BLUD
Tabel 11	Belanja Modal BLUD
Tabel 12	Kas di Bendahara BLUD
Tabel 13	Kas di Bendahara BOS
Tabel 14	Persediaan
Tabel 15	Peralatan dan Mesin
Tabel 16	Gedung dan Bangunan
Tabel 17	Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tabel 18	Aset Tetap Lainnya
Tabel 19	Aset Lainnya
Tabel 20	Ekuitas
Tabel 21	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO
Tabel 22	Pendapatan BLUD dari Hibah LO
Tabel 23	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO
Tabel 24	Pendapatan BLUD dari APBD LO
Tabel 25	Pendapatan BLUD dari Lain lain Pendapatan BLUD yang Sah LO
Tabel 26	Belanja Pegawai BLUD LO
Tabel 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD LO

Tabel 28 Arus Masuk Kas dari Aktifitas Operasi
Tabel 29 Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi
Tabel 30 Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi
Tabel 31 Arus Masuk Kas dari Aktifitas Investasi
Tabel 32 Arus Keluar Kas dari Aktifitas Investasi
Tabel 33 Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi
Tabel 34 Arus Masuk Kas dari Aktifitas Pendanaan
Tabel 35 Arus Keluar Kas dari Aktifitas Pendanaan
Tabel 36 Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan
Tabel 37 Arus Masuk Kas dari Aktifitas Transitoris
Tabel 38 Arus Keluar Kas dari Aktifitas Transitoris
Tabel 39 Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris
Tabel 40 Penurunan Kas Bersih
Tabel 41 Saldo Akhir Kas
Tabel 42 Ekuitas Awal
Table 43 Ekuitas Akhir

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lampiran lampiran lainnya sebagai CaLK

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Batam Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan BLUD. BLUD SMK Negeri 1 Batam sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana demi mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kepada peserta didik.

Laporan Keuangan ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai serta mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan bagi semua pihak.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh pemangku kepentingan.

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan BLUD SMK NEGERI 1 BATAM
Provinsi Kepulauan Riau,

Deden Suryana, M.Pd
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 197506022003121010

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan SMK NEGERI 1 BATAM Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (iii) Neraca; (iv) Laporan Operasional (LO); (v) Laporan Arus Kas (LAK); (vi) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (vii) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan BLUD SMK NEGERI 1 BATAM
Provinsi Kepulauan Riau,

Deden Suryana, M.Pd
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 197506022003121010

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 1 BATAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN**	**8.199.847.000,00**	**6.485.864.379,00**	**79,24**	**11.180.290.773,00**
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	230.000.000,00	240.582.429,00	104,58	105.073.482,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00	#NUM!	0,00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	330.000.000,00	384.850.050,00	116,62	365.532.800,00
6	Pendapatan Hibah	1.771.837.000,00	0,00	0,00	5.405.799.274,00
7	Pendapatan APBN/APBD	5.823.510.000,00	5.823.510.000,00	100,00	5.299.993.900,00
8	Lain lain Pendapatan BLUD yang Sah	3.700.000,00	2.911.950,00	81,68	3.997.197,00
	Jumlah PENDAPATAN	**8.199.847.000,00**	**6.485.864.379,00**	**79,24**	**11.180.290.773,00**
9	**BELANJA**				
10	**BELANJA OPERASI**	**4.733.112.816,00**	**4.319.107.967,00**	**91,25**	**11.455.998.166,00**
11	Belanja Pegawai	0,00	0,00	#NUM!	0,00
12	Belanja Barang dan Jasa	4.733.112.816,00	4.319.107.967,00	91,25	11.455.998.166,00
13	Bunga	0,00	0,00	#NUM!	0,00
14	Belanja Lain-lain	0,00	0,00	#NUM!	0,00
15	**BELANJA MODAL**	**3.779.641.000,00**	**1.994.382.200,00**	**52,81**	**1.832.480.460,00**
16	Belanja Tanah	0,00	0,00	#NUM!	0,00
17	Belanja Peralatan dan Mesin	1.913.603.000,00	1.427.621.600,00	74,60	268.760.460,00
18	Belanja Gedung dan Bangunan	1.408.037.000,00	0,00	0,00	310.276.000,00
19	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	#NUM!	161.669.000,00
20	Belanja Aset Tetap Lainnya	565.951.000,00	566.951.000,00	100,00	391.832.000,00
21	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	#NUM!	0,00
	Jumlah BELANJA	**8.498.753.816,00**	**6.313.890.467,00**	**74,30**	**13.488.484.626,00**
	Surplus/ Defisit Sebelum Pembiayaan	**(338.906.816,00)**	**(47.930.088,00)**	**14,07**	**(1.308.173.853,00)**
22	**PENERIMAAN**				
23	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**338.906.816,00**	**400.877.764,00**	**117,88**	**1.708.851.617,00**
24	Penggunaan SILPA	338.906.816,00	400.877.764,00	117,88	1.708.851.617,00
25	Penerimaan dari Divestasi	0,00	0,00	#NUM!	0,00
26	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00	#NUM!	0,00
	Jumlah PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**338.906.816,00**	**400.877.764,00**	**117,88**	**1.708.851.617,00**
27	**PENGELUARAN**				
28	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**0,00**	**0,00**	**#NUM!**	**0,00**
29	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00	#NUM!	0,00
30	Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00	#NUM!	0,00
31	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00	#NUM!	0,00
	Jumlah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**0,00**	**0,00**	**#NUM!**	**0,00**
	Pembiayaan Neto	**338.906.816,00**	**400.877.764,00**	**117,88**	**1.708.851.617,00**
	Surplus/ Defisit	**0,00**	**352.851.676,00**	**0,00**	**400.677.764,00**

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan BLUD SMK NEGERI 1 BATAM
Provinsi Kepulauan Riau

Deden Suryana, M.Pd
Pembina / IVb
NIP. 19750602 200312 1 010

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 1 BATAM
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2.1	400.677.764,00	1.708.851.617,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.2.2	0,00	0,00
3	Subtotal (1-2)		400.677.764,00	1.708.851.617,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	7.5.2.3	(47.826.088,00)	(1.308.173.853,00)
5	Subtotal (3+4)		352.851.676,00	400.677.764,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		(60.771.148,00)	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	7.5.2.6	292.080.528,00	400.677.764,00

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan BLUD SMK NEGERI 1 BATAM
Provinsi Kepulauan Riau

Deden Suryana, M.Pd
Pembina / IVb
NIP. 19750602 200312 1 010

NERACA

PEMERINTAH KOTA KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 1 BATAM
NERACA (BLUD)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	**ASET**	**1.1.**	**25.944.290.888,01**	**24.053.924.222,68**
2	**ASET LANCAR**	**1.1.1.**	**293.095.057,00**	**400.677.764,00**
0003	Kas di Bendahara Penerimaan	1.1.1.00.	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.1.1.01.	0,00	0,00
5	Kas di BLUD	1.1.1.02.	292.080.528,00	400.045.216,00
6	Kas Dana BOS	1.1.1.03.	0,00	0,00
7	Kas Dana PSP	1.1.1.04.	0,00	632.548,00
8	Kas Lainnya Setara Kas	1.1.1.05.	1.014.529,00	0,00
9	Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum	1.1.1.06.	0,00	0,00
10	Piutang Pajak	1.1.1.07.	0,00	0,00
11	Piutang Retribusi	1.1.1.08.	0,00	0,00
12	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.08.	0,00	0,00
13	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.09.	0,00	0,00
14	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.1.10.	0,00	0,00
15	Belanja dibayar dimuka	1.1.1.11.	0,00	0,00
16	Piutang Lainnya	1.1.1.12.	0,00	0,00
17	Persediaan Badan Layanan Umum	1.1.1.13.	0,00	0,00
18	Aset Untuk Dikonsolidasikan	1.1.1.14.	0,00	0,00
	Jumlah ASET LANCAR		293.095.057,00	400.677.764,00
19	**ASET TETAP**	**1.1.2.**	**25.247.385.831,01**	**23.249.436.458,68**
20	Tanah	1.1.2.01.	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
21	Peralatan dan Mesin	1.1.2.02.	16.609.932.892,59	15.244.199.314,59
22	Gedung dan Bangunan	1.1.2.03.	15.566.847.257,62	13.867.810.257,62
23	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.1.2.04.	310.837.500,00	310.837.500,00
24	Aset Tetap Lainnya	1.1.2.05.	4.001.647.394,00	3.434.606.394,00
25	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.1.2.06.	0,00	0,00
26	Akumulasi Penyusutan	1.1.2.07.	(16.241.879.213,20)	(14.608.107.007,53)
	Jumlah ASET TETAP		25.247.385.831,01	23.249.436.458,68
27	**PIUTANG JANGKA PANJANG**	**1.1.3.**	**0,00**	**0,00**
28	Tagihan Penjualan Angsuran	1.1.3.01.	0,00	0,00
29	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	1.1.3.02.	0,00	0,00
30	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.3.03.	0,00	0,00
	Jumlah PIUTANG JANGKA PANJANG		0,00	0,00
31	**ASET LAINNYA**	**1.1.4.**	**403.810.000,00**	**403.810.000,00**
32	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.1.4.01.	0,00	0,00

33	Dana Kelolaan	1.1.4.02.	0,00	0,00
34	Aset yang dibatasi Penggunaannya	1.1.4.03.	0,00	0,00
35	Aset Tak Berwujud	1.1.4.04.	271.590.000,00	271.590.000,00
36	Aset Lain - Lain	1.1.4.05.	132.220.000,00	132.220.000,00
37	Akumulasi Amortisasi	1.1.4.06.	0,00	0,00
	Jumlah ASET LAINNYA		403.810.000,00	403.810.000,00
	JUMLAH ASET		25.944.290.888,01	24.053.924.222,68
38	**KEWAJIBAN**	**1.2.**	**1.014.529,00**	**0,00**
39	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**1.2.1.**	**1.014.529,00**	**0,00**
40	Utang Usaha	1.2.1.01.	0,00	0,00
41	Utang Pihak Ketiga	1.2.1.02.	0,00	0,00
42	Utang Pajak	1.2.1.03.	1.014.529,00	0,00
43	Utang Kepada KUN	1.2.1.04.	0,00	0,00
44	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.2.1.05.	0,00	0,00
45	Belanja yang masih harus dibayar	1.2.1.06.	0,00	0,00
46	Pendapatan Diterima Dimuka	1.2.1.07.	0,00	0,00
47	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.2.1.08.	0,00	0,00
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		1.014.529,00	0,00
48	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**1.2.2.**	**0,00**	**0,00**
49	Utang Jangka Panjang	1.2.2.01.	0,00	0,00
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		1.014.529,00	0,00
50	**EKUITAS**	**1.3.**	**25.943.276.359,01**	**24.053.924.222,68**
51	**EKUITAS**	**1.3.1.**	**25.943.276.359,01**	**24.053.924.222,68**
52	Ekuitas	1.3.1.01.	25.943.276.359,01	24.053.924.222,68
	Jumlah EKUITAS		25.943.276.359,01	24.053.924.222,68
	JUMLAH EKUITAS		25.943.276.359,01	24.053.924.222,68
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		25.944.290.888,01	24.053.924.222,68

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan BLUD SMK NEGERI 1 BATAM
Provinsi Kepulauan Riau,

Deden Suryana, M.Pd
Pembina / IVb
NIP. 19750602 200312 1 010

LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KOTA KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 1 BATAM
LAPORAN OPERASIONAL (BLUD)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	**PENDAPATAN**				
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	248.592.429,00	105.073.462,00	143.518.967,00	57,75
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00	0,00	#N/A
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama	384.850.000,00	365.530.000,00	19.320.000,00	5,02
5	Pendapatan Hibah	1.714.637.000,00	10.440.447.892,59	(8.725.810.892,59)	(491,41)
6	Pendapatan Usaha Lainnya	2.911.950,00	3.897.137,00	(985.187,00)	(33,83)
7	Pendapatan APBN/ APBD	5.829.510.000,00	5.299.990.000,00	529.519.100,00	9,08
	Jumlah PENDAPATAN	**8.240.501.379,00**	**16.269.939.381,59**	(8.025.437.922,59)	(97,44)
8	**BEBAN**				
9	Beban Pegawai	0,00	0,00	0,00	#N/A
10	Beban Pendidikan	2.565.646.343,00	3.818.307.558,00	(1.252.661.215,00)	(48,82)
11	Beban Jasa	1.024.575.426,00	4.151.241.855,00	(3.126.666.429,00)	(305,17)
12	Beban Pemeliharaan	209.066.840,00	1.227.714.120,00	(1.018.647.280,00)	(487,24)
13	Beban Langganan Daya dan Jasa	635.425.262,00	0,00	635.425.262,00	100,00
14	Beban Perjalanan Dinas	221.882.018,00	873.690.803,00	(651.788.785,00)	(293,75)
15	Beban Penyusutan Aset	1.633.772.205,67	6.457.857.064,53	(4.824.084.858,86)	(295,27)
16	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	#N/A
	Jumlah BEBAN	**6.290.378.094,67**	**16.528.811.400,53**	(10.238.433.305,86)	(162,76)
	Surplus/Defisit Operasional	**1.950.123.284,33**	**(258.872.098,94)**	2.208.995.383,27	111,27
17	**KEGIATAN NON OPERASIONAL**				
18	Surplus/ Defisit Penjualan Aset Nonlancar	0,00	0,00	0,00	#N/A
19	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	0,00	0,00	0,00	#N/A
20	Surplus/ Defisit dari Kegatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	#N/A
	Jumlah Surplus/Defisit Dari KEGIATAN NON OPERASIONAL	**0,00**	**0,00**	0,00	#N/A
	Surplus/Defisit Sebelum POS LUAR BIASA	**1.950.123.284,33**	**(258.872.098,94)**	2.208.995.383,27	111,27
21	**POS LUAR BIASA**				
22	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	#N/A
23	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	#N/A
	Jumlah POS LUAR BIASA	**0,00**	**0,00**	0,00	#N/A
	Surplus/Defisit-LO	**1.950.123.284,33**	**(258.872.098,94)**	2.208.995.383,27	111,27

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan BLUD SMK NEGERI 1 BATAM
Provinsi Kepulauan Riau,

Deden Suryana, M.Pd
Pembina / Ivb
NIP. 19750602 200312 1 010

LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 1 BATAM
LAPORAN ARUS KAS (BLUD)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	**Arus Masuk Kas**		
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	248.592.429,00	105.073.462,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	384.850.000,00	365.530.000,00
6	Pendapatan Hibah	0,00	5.405.799.274,00
7	Pendapatan APBN/APBD	5.829.510.000,00	5.299.090.900,00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	2.911.950,00	3.897.137,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	6.465.864.379,00	11.180.290.773,00
9	**Arus Keluar Kas**		
10	Pembayaran Pegawai	0,00	0,00
11	Pembayaran Barang dan Jasa	3.450.893.847,00	7.638.379.963,00
12	Pembayaran Pemeliharaan	210.896.840,00	1.227.714.120,00
13	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	635.425.262,00	0,00
14	Pembayaran Perjalanan Dinas	221.892.018,00	873.690.803,00
15	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	4.519.107.967,00	9.739.784.886,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi	1.946.756.412,00	1.440.505.887,00
16	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
17	**Arus Masuk Kas**		
18	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
19	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
20	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
21	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
22	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
23	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
24	Penerimaan dari Divestasi	0,00	0,00
25	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
26	**Arus Keluar Kas**		
27	Perolehan Tanah	0,00	0,00
28	Perolehan Peralatan dan Mesin	1.427.631.500,00	1.984.913.740,00
29	Perolehan Gedung dan Bangunan	0,00	210.275.000,00
30	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	161.659.000,00
31	Perolehan Aset Tetap Lainnya	566.951.000,00	391.832.000,00

32	Pendekan Aset Lainnya	0,00	0,00
33	Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00
34	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	1.994.582.500,00	2.748.679.740,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(1.994.582.500,00)	(2.748.679.740,00)
35	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**		
36	**Arus Masuk Kas**		
37	Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00
38	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
39	**Arus Keluar Kas**		
40	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00
41	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00
42	Penyetoran ke Kas Negara	60.771.148,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	60.771.148,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(60.771.148,00)	0,00
43	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**		
44	**Arus Masuk Kas**		
45	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.014.529,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	1.014.529,00	0,00
46	**Arus Keluar Kas**		
47	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	1.014.529,00	0,00
48	**Kenaikan/ Penurunan Kas BLU**	(107.582.707,00)	(1.308.173.853,00)
49	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLU**	400.677.764,00	1.708.851.617,00
50	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU**	293.085.057,00	400.677.764,00

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan BLUD SMK NEGERI 1 BATAM
Provinsi Kepulauan Riau,

Deden Suryana, M.Pd
Pembina / IVb
NIP. 19750602 200312 1 010

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 1 BATAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (BLUD)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Ekuitas Awal		24.053.924.222,68	24.312.796.321,62
2	Surplus/Defisit-LO		1.950.123.284,33	(258.872.098,94)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		(60.771.148,00)	0,00
4	Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
6	Lain-lain		(60.771.148,00)	0,00
7	Ekuitas Akhir		**25.943.276.359,01**	**24.053.924.222,68**

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan BLUD SMK NEGERI 1 BATAM
Provinsi Kepulauan Riau,

Deden Suryana, M.Pd
Pembina / Ivb
NIP. 19750602 200312 1 010

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan Keuangan BLUD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan BLUD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala BLUD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan BLUD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SMK Negeri 1 Batam Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan RiauTahun 2025.
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
19. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Batam Tahun 2025, adalah tanggungjawab sepenuhnya BLUD SMK Negeri 1 Batam, dalam hal ini adalah Pimpinan BLUD SMK Negeri 1 Batam.

1.4 Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Batam tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Batam tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (*Subsequent Event*) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Batam tahun 2026. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2026.

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Batam adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Batam
- 1.4 Periode Pelaporan Keuangan
- 1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Profil BLUD SMK Negeri 1 Batam
- 2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 1 Batam
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 1 Batam
- 2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 1 Batam tahun 2025

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Asumsi dasar Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan
4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja
4.7 Kebijakan Akuntansi Kas
4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan
4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
5.1 Laporan Realisasi Anggaran
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3 Neraca
5.4 Laporan Operasional
5.5 Laporan Arus Kas
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
5.7 Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan atas informasi – Informasi non Keuangan
6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

Bab VII Penutup

BAB II

PROFIL BLUD SMK NEGERI 1 BATAM

2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 1 Batam

Data bisa diperoleh dari RENSTRA SMK Negeri 1 Batam

BLUD SMK Negeri 1 Batam memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten serta tenaga ahli yang mendukung pelaksanaan *Teaching Factory (TEFA)*. SDM yang tersedia meliputi:

1. Tenaga Pendidik (Guru Produktif dan Normatif):
   - Guru bersertifikasi keahlian industri sesuai bidang kompetensi.
   - Guru mata pelajaran umum yang mendukung kurikulum berbasis kompetensi.
   - Instruktur dari dunia industri yang terlibat dalam program pelatihan siswa.
2. Tenaga Kependidikan:
   - Staf administrasi yang mengelola keuangan dan operasional BLUD.
   - Teknisi laboratorium dan workshop untuk mendukung kegiatan praktik.
   - Tenaga keamanan dan kebersihan untuk menjaga lingkungan sekolah yang kondusif.
3. Kemitraan dengan Industri:
   - Mengundang praktisi industri sebagai instruktur tamu.
   - Menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk program magang dan penyerapan tenaga kerja.
   - Mengembangkan skema sertifikasi kompetensi yang diakui dunia usaha dan industri.

Sebagai SMK BLUD yang berbasis *Teaching Factory* (TEFA), SMK Negeri 1 Batam telah memiliki berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran berbasis produksi dan layanan industri, di antaranya:

1. Ruang Kelas dan Laboratorium:
   - Ruang kelas berbasis untuk pembelajaran teori.
   - Laboratorium komputer dan IPAS untuk kegiatan pembelajaran siswa.
   - Perpustakaan Ruang Ilmu sebagai pusat referensi dan literasi siswa.
2. Workshop dan Bengkel TEFA:
   - Workshop representatif yang mendukung kegiatan pembelajaran produktif sesuai dengan kompetensi keahlian siswa.
   - Workshop kegiatan TEFA sesuai dengan kompetensi Keahlian masing masing yang dilengkapi dengan peralatan skala industri.
   - Workshop TEFA yang memenuhi produksi pemesanan projek dari industri.
3. Fasilitas Pendukung:
   - Gedung Aula yang representatif untuk acara sekolah dan kemasyarakatan yang dilengkapi dengan fasilitas sound system, pendingin ruangan, kursi dan meja yang memadai.
   - Area publik seperti kantin dan koperasi sekolah.
   - Ruang administrasi dan perkantoran.
   - Area parkir dan aksesibilitas.

Sebagai BLUD, SMK Negeri 1 Batam memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan Teaching Factory. Sumber dana sekolah berasal dari:

1. Dana BOS dan APBD:
   - Digunakan untuk operasional sekolah seperti pengadaan bahan ajar dan alat praktik.
2. Pendapatan dari Unit Usaha TEFA:
   - Hasil penjualan produk dari unit Teaching Factory.
   - Jasa layanan seperti jasa instalasi, desain grafis, atau programming.
   - Kerjasama dengan industri dalam proyek tertentu.
3. Bantuan dari Pemerintah dan Swasta:
   - Hibah atau bantuan dari pemerintah untuk pengembangan kurikulum dan fasilitas.
   - Sponsor dari perusahaan yang mendukung pengembangan Teaching Factory.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 1 Batam

2.2.1 Strategi BLUD SMK Negeri 1 Batam

Strategi yang ditempuh oleh Rencana Stategis Bisnis SMK Negeri 1 Batam selama kurun waktu Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

- Membudayakan nilai-nilai keimanan dan ketakwaaan serta karakter bangsa
- Meningkatnya penerapan karakter 5S
- Pengembangan kompetensi guru bahasa inggris dan bahasa lainnya
- Pengembangan Uji Sertifikasi Kompetensi
- Pengembangan Uji Sertifikasi Kompetensi
- Memelihara kelestarian dan lingkungan sekolah
- Pengembangan Teaching Factory
- Membangun budaya Sekolah sesuai dengan kearifan lokal
- Pengembangan sarana dan prasarana sekolah
- Program Pengadaan Bahan Praktek Dan Peralatan Sekolah
- Monitoring dan evaluasi saranan dan prasarana sekolah
- Pengembangan kurikulum
- Pembinaan rutin pada siswa yang berprestasi
- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- Manajemen berbasis sekolah dan tata kelola yang baik
- Pengembangan kerjasama dengan sekolah aliansi dan DU/DI (Institusi Pasangan) baik dalam negeri maupun luar negeri.
- Mengadakan program pelatihan / IHT sesuai dengan kebutuhan sekolah
- Pengembangan proses pembelajaran yang inovatif
- Melaksankan pendidikan dan pelatihan berbasis lingkungan
- Meningkatkan efisiensi listrik, air dan ATK

2.2.2 Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 1 Batam

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Rencana Strategis Bisnis SMK Negeri 1 Batam selama kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- Menerapkan nilai keimanan dan karakter 5 S dalam kegiatan pembelajaran di sekolah

- Memberikan peluang dalam meningkatkan Kompetensi Guru Bahasa Inggris dan Bahasa Asing lainnya baik itu dalam bentuk In House training maupun diklat/pelatihan dari pihak ketiga
- Mengembangkan unit Lembaga Uji Sertifikasi (LSP 2) sekolah sesuai Standart Nasional dan IDUKA
- Mengembangkan unit produksi dengan mencari mitra industri / IDUKA yang sesuai dengan bidang kompetensi keahlian
- Menerapakan kearifan lokal dalam pembelajaran di Sekolah
- Meningkatkan tersedianya fasilitas, bahan praktek dan peralatan yang dapat mendukung dalam pembelajaran, serta memonitoring dan mengevaluasi sarana dan prasarna sekolah.
- Sinkronisasi Kurikulum dengan IDUKA
- Melakukan revisi / update SMM ISO secara berkala dengan lembaga sertifikasi yang berwenang
- Membuat MOU dengan pihak DUDI
- Merencakan dan meningkatkan diklat / pelatihan yang diadakan oleh sekolah maupun lembaga diklat / pelatihan lainnya.
- Menerapkan Kurikulum berbasis lingkungan

2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 1 Batam

Tabel Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
BLUD SMK Negeri 1 Batam

No	Unit Teaching Factory (TEFA)	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Keterangan
1	TEFA TKJ	Jasa Instalasi jaringan dan PC, jasa pembuatan video pendek	Rp0,00	Rp0,00	0%	Tidak ada pemesanan terhadap jasa yang ditawarkan
2	TEFA TPM	Pembuatan benda kerja menggunakan mesin bubut dan mesin frais, jasa drawing, jasa pembuatan toolpart	Rp0,00	Rp0,00	0%	Tidak ada pemesanan terhadap jasa yang ditawarkan
3	TEFA TMK	Jasa program PLC, HMI, jasa desain 3D	Rp20.000.000,00	Rp8.950.000,00	45%	Rendahnya pemesanan terhadap jasa yang ditawarkan
4	TEFA TEI	Produksi wire harness	Rp222.000.000,00	Rp218.869.707,00	97%	Tingginya biaya produksi yang diperlukan
5	TEFA TOI	Pembuatan trainer dan jasa program PLC	Rp0,00	Rp0,00	0%	Tidak ada pemesanan terhadap jasa yang ditawarkan
6	TEFA TLS	Pembuatan teralis, kanopi, pintu dan pagar	Rp0,00	Rp0,00	0%	Tidak ada pemesanan terhadap jasa yang ditawarkan

Tabel 1 Tabel Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan

BAB III

INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja pada BLUD SMK, pada laporan keuangan ini digunakan sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat managemen yang digunakan untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran dan tujuan, untuk mewujudkan misi dan visi organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut akan disajikan data kinerja BLUD SMK Negeri 1 Batam Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target BLUD SMK Negeri 1 Batam Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
A. Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa					
1	Persentase kelulusan siswa	100%	99,7%	99,7%	2 siswa tidak lulus
2	Rata-rata nilai Ujian Kompetensi Keahlian (UKK)	83	84,33	105%	Melebihi target
3	Persentase siswa yang memperoleh sertifikasi kompetensi industri	65%	61%	94%	Beberapa siswa belum lulus uji sertifikasi
4	Persentase lulusan yang bekerja sesuai kompetensi dalam 6 bulan	85%	75%	88%	Sebagian siswa memilih melanjutkan kuliah atau kuliah sambil kerja
5	Persentase lulusan yang berwirausaha	20%	15%	75%	Program wirausaha belum berjalan dengan maksimal
B. Kinerja Keuangan dan Unit Usaha BLUD					
6	Persentase Pendapatan unit usaha BLUD terhadap biaya operasional sekolah	20%	17%	85%	Hampir mencapai target, kualitas produksi harus ditingkatkan
7	Efisiensi penggunaan dana BLUD sesuai rencana kerja	100%	97%	97%	Anggaran terserap dengan baik dan efektif
C. Kinerja Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)					
8	Jumlah kerja sama aktif dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	200 DUDI	197 DUDI	98%	Kerjasama dengan DUDI telah berjalan dengan baik
9	Persentase siswa yang menjalani magang industri	100%	93%	93%	Hampir seluruh siswa melakukan magang di industri

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
10	Jumlah produk atau jasa unggulan dari Teaching Factory (TEFA)	6 produk	2 produk	33%	TEFA belum berjalan maksimal
D. Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan					
11	Kepuasan siswa dan orang tua terhadap layanan pendidikan	88%	95%	108%	Melebihi target berdasarkan survei internal
12	Jumlah guru produktif bersertifikasi industri	50%	18%	36%	Jumlah guru produktif terbatas dan jam mengajar tinggi sehingga kesulitan dalam penyesuaian jadwal magang.

Tabel 2 Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target

Berdasarkan tabel pencapaian, secara keseluruhan BLUD SMK Negeri 1 Batam telah mencapai rata-rata 84.30% dari target yang ditetapkan. Beberapa indikator bahkan melebihi target seperti Rata-rata nilai Ujian Kompetensi Keahlian (UKK), dan kepuasan siswa terhadap layanan pendidikan. Namun, ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, seperti jumlah lulusan yang berwirausaha, pengembangan produk atau jasa unggulan dari Teaching Factory dan peningkatan jumlah guru produktif yang bersertifikasi industri. Untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memberikan bimbingan wirausaha kepada calon lulusan dengan bekerjasama dengan wirausaha lokal
2. Pengembangan produk Teaching Factory agar lebih kompetitif di pasar.
3. Optimalisasi pemasaran unit usaha BLUD untuk meningkatkan pendapatan sekolah.
4. Bekerjasama dengan industri untuk mengadakan sertifikasi langsung yang diselenggarakan di sekolah.

Dengan perbaikan strategi ini, diharapkan BLUD SMK Negeri 1 Batam dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya pada tahun mendatang.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Adapun hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target realisasi antara lain :

a. Hambatan dalam Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa
   1. Kurangnya kesiapan siswa dalam ujian sertifikasi industri
      - Tidak semua siswa memiliki kesiapan yang cukup untuk lulus uji sertifikasi.
      - Kurangnya akses terhadap bahan ajar atau simulasi ujian sesuai standar industri.
   2. Penyerapan lulusan ke dunia kerja belum optimal
      - Persaingan ketat di dunia kerja sehingga tidak semua lulusan langsung terserap.
      - Kurangnya pengalaman praktis yang relevan dengan kebutuhan industri.
      - Masih ada lulusan yang lebih memilih bekerja di luar bidang keahlian mereka.

b. Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan dan Unit Usaha BLUD
   1. Pendapatan unit usaha BLUD belum mencapai target
      - Persaingan dengan produk atau jasa dari industri komersial yang lebih mapan.
      - Kurangnya strategi pemasaran dan branding produk/jasa SMK BLUD.
      - Keterbatasan modal untuk meningkatkan skala produksi dan inovasi produk.
      - Keterbatasan personil BLUD dalam mengelola Tefa dengan maksimal karena personil BLUD adalah guru yang juga memiliki jam mengajar tinggi sehingga tidak terlalu focus dalam pengembangan BLUD.
   2. Efisiensi penggunaan dana BLUD
      - Masih ada beberapa program yang belum berjalan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas.
      - Keterbatasan dana dalam pengembangan Tefa dan juga pembiayaan tenaga pendukung kegiatan.

c. Hambatan dalam Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)
   1. Jumlah produk unggulan Teaching Factory belum optimal
      - Keterbatasan bahan baku atau alat produksi yang menyebabkan terhambatnya pengembangan produk baru.
      - Produk belum sepenuhnya sesuai standar pasar, sehingga masih butuh perbaikan dalam kualitas dan pemasaran.
      - Tenaga pendukung kegiatan TEFA adalah guru produktif yang memiliki jam mengajar yang tinggi dan memiliki tanggung jawab lainnya.
   2. Kemitraan industri masih perlu diperluas
      - Tidak semua industri bersedia menerima siswa magang karena keterbatasan kapasitas mereka.
      - Kurangnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja.

d. Hambatan dalam Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan
   1. Tingkat kepuasan siswa dan orang tua belum maksimal
      - Jumlah rombongan dalam pembelajaran tak sebanding dengan ruang dan peralatan yang tersedia
      - Orang tua belum sepenuhnya memahami program-program di SMK, sehingga kurang mendukung kegiatan sekolah
   2. Kurangnya jumlah guru bersertifikasi industri
      - Masih terdapat kendala dalam menyesuaikan jadwal guru dengan lembaga industri terkait.
      - Jumlah guru di sekolah terbatas dengan jumlah jam mengajar yang tinggi sehingga kesulitan dalam melakukan sertifikasi di luar sekolah.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Akuntansi adalah BLUD SMK Negeri 1 Batam Provinsi Kepulauan Riau.

4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas;
b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Batam Provinsi Kepulauan Riau adalah:

a) ***Basis Kas*** untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam ***Laporan Realisasi Anggaran***
Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat Kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

b) ***Basis akrual*** untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam ***Neraca***
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

c) ***Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran*** berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

d) ***Basis akrual untuk neraca*** berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas;

4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengakuan dan pengukuran atas transaksi kejadian ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan ini adalah:

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.
Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi

tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD , adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Batam Tahun 2025, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat Diterima pada Rekening Kas Umum. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum untuk seluruh transaksi setelah dilakukan pengesahan definitif bendahara. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.



4.7 Kebijakan Akuntansi Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas secara umum diakui jika memenuhi kriteria:

a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.

4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari:

- Barang Konsumsi;
- Bahan untuk pemeliharaan;
- Suku cadang;
- Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
- Bahan baku;
- Barang dalam proses/setengah jadi;

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal; diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.

4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.

4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

BAB V RINCIAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang telah disusun BLUD SMK Negeri 1 Batam periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini:

5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan – LRA

Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Batam mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp6.465.864.379,00 atau sebesar 79.24% dari target yang ditetapkan sebesar Rp8.159.847.000,00 sebagaimana ikhtisar sebagai berikut: :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	Rp230.000.000,00	Rp248.592.429,00	108.08%	Rp105.073.462,00
Pendapatan BLUD dari Hibah	Rp1.774.637.000,00	Rp0,00	0.00%	Rp5.405.799.274,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	Rp320.000.000,00	Rp384.850.000,00	120.27%	Rp365.530.000,00
Pendapatan BLUD dari APBD	Rp5.829.510.000,00	Rp5.829.510.000,00	100.00%	Rp5.299.990.900,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	Rp5.700.000,00	Rp2.911.950,00	51.09%	Rp3.897.137,00
TOTAL PENDAPATAN BLUD	Rp8.159.847.000,00	Rp6.465.864.379,00	79.24%	Rp11.180.290.773,00

Tabel 3 Pendapatan - LRA

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Tahun 2025 sebesar Rp248.592.429,00 atau 108.08% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp230.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Pendapatan TEFA TPM	Rp300.000,00	Rp810.000,00	270.00%	Rp1.455.000,00
Pendapatan TEFA TMK	Rp2.000.000,00	Rp3.842.864,00	192.14%	Rp0,00
Pendapatan TEFA TEI	Rp227.700.000,00	Rp243.939.565,00	107.13%	Rp99.118.462,00
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	Rp230.000.000,00	Rp248.592.429,00	108.08%	Rp105.073.462,00

Tabel 4 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp1.774.637.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Hibah SPP	Rp0,00	Rp0,00	0%	Rp5.041.799.274,00
Hibah BOP Kepri	Rp0,00	Rp0,00	0%	Rp10.000.000,00
Hibah Dinas Pendidikan Prov Kepri	Rp0,00	Rp0,00	0%	Rp40.200.000,00
Bantuan ADEM	Rp69.000.000,00	Rp0,00	0%	Rp13.800.000,00
Banper Tefa	Rp0,00	Rp0,00	0%	Rp300.000.000,00
Banper Revitalisasi	Rp1.699.037.000,00	Rp0,00	0%	Rp0,00
Hibah MBG	Rp6.600.000,00	Rp0,00	0%	Rp0,00
Total Pendapatan BLUD dari Hibah	Rp1.774.637.000,00	Rp0.00	0%	Rp 5.405.799.274,00

Tabel 5 Pendapatan BLUD dari Hibah

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Tahun 2025 sebesar Rp384.850.000,00 atau 120.27% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp320.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Kerjasama Penyewaaan Gedung	Rp158.000.000,00	Rp146.850.000,00	92.94%	Rp73.495.000,00
Kerjasama Penyewaan Kantin	Rp162.000.000,00	Rp232.000.000,00	143.21%	Rp267.245.000,00
Pelatihan BSDC	Rp0,00	Rp0,00	0%	Rp21.850.000,00
Penyewaan Mesin	Rp0.00	Rp0.00	0%	Rp2.940.000,00
Penyewaan Toko Koperasi	Rp0,00	Rp6.000.000,00	0%	Rp0,00
Total Pendapatan	Rp320.000.000,00	Rp.384.850.000,00	120.27%	Rp365.530.000,00

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain				

Tabel 6 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

iv) Pendapatan BLUD dari APBD

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD Tahun 2025 sebesar Rp5.829.510.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp5.829.510.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Dana BOS Reguler	Rp6.669.510.000,00	Rp6.669.510.000,00	100%	Rp5.139.990.900,00
Dana BOS kinerja	Rp160.000.000,00	Rp160.000.000,00	100%	Rp160.000.000,00
Total Pendapatan BLUD dari APBD	Rp5.829.510.000,00	Rp5.829.510.000,00	100%	Rp5.299.990.900,00

Tabel 7 Pendapatan BLUD dari APBD

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp2.911.950,00 atau 51.09% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp5.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Pendapatan Bunga	Rp3.100.000,00	Rp0,00	0%	Rp0,00
Jasa Giro	Rp2.600.000,00	Rp2.911.950,00	111.99 %	Rp3.897.137,00
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	Rp5.700.000,00	Rp2.911.950,00	51.09%	Rp3.897.137,00

Tabel 8 Pendapatan BLUD dari Lain lain Pendapatan BLUD yang sah

b. Belanja

1.Belanja Pegawai BLUD

Berupa Belanja Gaji & Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan BLUD dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0.00% dari total anggaran belanja pegawai BLUD yang sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp0,00	Rp0,00	0 %
Belanja Tambahan Penghasilan	Rp0,00	Rp0,00	0 %

Total Belanja Pegawai BLUD	Rp0,00	Rp0,00	0 %

Tabel 9 Belanja Pegawai BLUD

2.Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp4.519.107.967,00 atau 95.68% dari total anggaran belanja barang dan jasa yang sebesar Rp4.723.112.616,00 dengan rincian sebagai berikut :

	ANGGARAN	**REALISASI**	**%**
Belanja Barang	Rp2.546.219.982,00	Rp2.503.748.421,00	98.33%
Belanja Jasa	Rp1.591.966.942,00	Rp1.584.400.688,00	99.52%
Belanja Pemeliharaan	Rp210.100.840,00	Rp209.066.840,00	99.51%
Belanja Perjalanan Dinas	Rp299.224.852,00	Rp221.892.018,00	74.16%
Belanja Uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga / pihak lain masyarakat (Program ADEM)	Rp75.600.000,00	Rp0,00	0%
Total Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp4.723.112.616,00	Rp4.519.107.967,00	95.68%

Tabel 10 Belanja Barang dan Jasa BLUD

3.Belanja Modal BLUD

Belanja modal BLUD terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp1.427.631.500,00 atau 94.50% dari total anggaran belanja modal peralatan dan mesin yang sebesar Rp1.510.653.000,00, belanja modal gedung dan bangunan yang terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total anggaran belanja modal gedung dan bangunan yang sebesar Rp1.699.037.000,00, belanja modal jaringan yang terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total anggaran belanja modal jaringan yang sebesar Rp00,00, dan belanja modal aset tetap lainnya yang terealisasi sebesar Rp566.951.000,00 atau 100,00% dari total anggaran belanja modal aset tetap lainnya yang sebesar Rp566.951.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	**Anggaran(Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**%**	**Realisasi 2024**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.510.653.000,00	Rp1.427.631.500,00	94.50%	Rp268.700.460,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp1.699.037.000,00	Rp0,00	0%	Rp210.275.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp0,00	Rp0,00	0 %	Rp161.659.000,00
Belanja Modal Aset tetap lainnya	Rp566.951.000,00	Rp566.951.000,00	100%	Rp391.832.000,00
Total Belanja Modal BLUD	Rp3.776.641.000,00	Rp1.994.582.500,00	52.81%	Rp1.032.466.460,00

Tabel 11 Belanja Modal BLUD

5.2 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo awal SAL pada tahun 2025 sebesar Rp400.677.764,00. merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

2) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan digunakan dalam rangka membiayai defisit tahun anggaran berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp400.677.764,00 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

3) Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SiLPA tahun 2025 di Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp292.080.528,00.

5.3 Neraca

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- Berupa kas/setara kas dan persediaan

Aset Lancar sebesar Rp293.095.057,00 yang dimiliki BLUD SMK Negeri 1 Batam per 31 Desember 2025 terdiri dari:

a. Kas di Bendahara BLUD

Kas BLUD adalah semua bentuk penerimaan dan pengeluaran uang tunai atau setara kas yang dikelola oleh SMK Negeri 1 Batam dalam rangka menjalankan operasionalnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, dan pendapatan lainnya. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BLUD sebesar RP292.080.528,00 dengan rincian :

Uraian	Jumlah
Kas di Bank	Rp288.871.568,00
Kas Tunai	Rp3.208.960,00
Total Kas di Bendahara BLUD	Rp292.080.528,00

Tabel 12 Kas di Bendahara BLUD

b. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan kas dibawah pengelolaan bendahara BOS yang bersumber dari pemerintah untuk mendukung operasional sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan tanpa membebani peserta didik. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp0,00 dengan rincian :

Uraian	Jumlah
Kas di Bank	Rp0,00
Kas Tunai	Rp0,00
Total Kas di Bendahara BOS	Rp0,00

Tabel 13 Kas di Bendahara BOS

c. Kas Dana P2SP

Dana P2SP sejak bulan Juli 2024 sudah tidak dipungut lagi kepada siswa.

d. Kas Lainnya Setara Kas

Dana Lainnya Setara Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.014.529,00.

e. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp Rp0,00 terdiri dari :

Uraian	Jumlah
Persediaan Barang Habis Pakai	Rp00,00
- Bahan	Rp00,00
- Suku Cadang	Rp00,00
Persediaan BarangTidak Habis Pakai	Rp00,00
Total Persediaan	Rp00,00

Tabel 14 Persediaan

2. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh pelayanan umum. Aset tetap sebesar Rp25.247.385.831,01 per 31 Desember 2025 merupakan nilai perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan yang pengadaannya bersumber dari pengelolaan dana BOS dan BLUD.

a. Tanah

Nilai aset tanah BLUD SMK Negeri 1 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.000.000.000,00 dan tidak terdapat penambahan aset tetap tanah selama tahun 2025.

b. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin BLUD SMK Negeri 1 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.609.932.892,59 meningkat sebesar Rp1.365.733.578,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp15.244.199.314,59

Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**Rp15.244.199.314,59**
Penambahan :	
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.365.733.578,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp00,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp00,00
- Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kementerian	Rp00,00
Total Penambahan	Rp1.365.733.578,00
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**Rp00,00**
Reklasifikasi ke Aset Tetap	**Rp00,00**
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	**Rp00,00**
Total Pengurangan :	**Rp00,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**Rp16.609.932.892,59**

Tabel 15 Peralatan dan Mesin

c. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan BLUD SMK Negeri 1 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp15.566.847.257,62 meningkat sebesar Rp1.699.037.000,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp13.867.810.257,62 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**Rp13.867.810.257,62**
Penambahan :	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp1.699.037.000,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap xxxxx	Rp0,00
- Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kementerian	Rp0,00
Total Penambahan	Rp1.699.037.000,00
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	
Total Pengurangan :	**Rp0,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**Rp15.566.847.257,62**

Tabel 16 Gedung dan Bangunan

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD SMK Negeri 1 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp310.837.500,00 meningkat sebesar

Rp0,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp310.837.500,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**Rp310.837.500,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp0,000
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp0,00
- Hibah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kementerian	Rp0,00
Total Penambahan	Rp0,00
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel...Dst	
Total Pengurangan :	**Rp0,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**Rp310.837.50,00**

Tabel 17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

e. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Aset Tetap Lainnya BLUD SMK Negeri 1 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.001.647.394,00 meningkat sebesar Rp566.951.000,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp3.434.696.394,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	**Rp3.434.696.394,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp566.951.000,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp0,00
- Hibah Aset Tetap Lainnya dari Kementerian xxx.....Dst	Rp0,00
Total Penambahan	Rp566.951.000,00
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Lainnya	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	
Total Pengurangan :	**Rp0,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya	**Rp4.001.647.394,00**

Tabel 18 Aset Tetap Lainnya

3. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya dapat berupa Aset Tidak Berwujud dan Aset Rusak Berat/Tidak Digunakan Lagi dalam Operasional Kegiatan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Batam. mencatat Aset Lainnya sebesar Rp403.810.000,00 terdiri dari Aset Tidak Berwujud (Software, dll) sebesar Rp271.590.000,00 dan Aset lain-lain sebesar Rp132.220.000,00. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Lainnya	**Rp403.810.000,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Lainnya	Rp0,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap xxxxx	Rp0,00
- Hibah Aset Lainnya dari Kementerian xxx.....Dst	Rp0,00
Total Penambahan	Rp0,00
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Lainnya	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	
Total Pengurangan :	**Rp0,00**
Saldo Akhir Aset Lainnya	**Rp403.810.000,00**

Tabel 19 Aset Lainnya

4. Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Batam memiliki kewajiban jangka pendek berupa utang pajak sebesar Rp1.014.529,00.

5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD SMK Negeri 1 Batam pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pada Tahun 2025 Ekuitas adalah sebesar Rp25.943.276.359,01.

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Ekuitas	**Rp24.053.924.222,68**
- Surplus/Defisit LO	Rp1.950.123.284,33

Uraian	Jumlah
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	(Rp60.771.148,00)
Saldo Ekuitas Akhir	**Rp25.943.276.359,01**

Tabel 20 Ekuitas

5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional
b) Beban dari kegiatan operasional
c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
d) Pos luar biasa
e) Surplus/defisit LO

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional

Pendapatan LO dari kegiatan operasional terdiri dari :

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO Tahun 2025 sebesar Rp248.592.429,00 lebih tinggi dari Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2024 sebesar Rp105.073.462,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan TEFA TPM	Rp810.000,00	Rp1.455.000,00	78.39 %	(Rp636.000,00)
Pendapatan TEFA TEI	Rp243.939.565,00	Rp99.118.462,00	59.36 %	Rp144.821.103,00
Pendapatan TEFA TOI	Rp0,00	Rp4.500.000,00	0%	(Rp4.500.000,00)
Pendapatan TEFA TMK	Rp3.842.864,00	Rp0,00	0%	Rp3.842.864,00
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO	Rp248.592.429,00	Rp105.073.462,00	57.73 %	Rp143.518.967,00

Tabel 21 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2025 sebesar Rp1.774.637.000,00 lebih rendah dari pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2024 sebesar Rp10.495.447.802,59 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Hibah SPP	Rp0,00	Rp5.041.799.274,00	0%	(Rp5.041.799.274,00)
Hibah BGP Kepri	Rp0,00	Rp10.000.000,00	0%	(Rp10.000.000,00)
Hibah Dinas Pendidikan Prov Kepri	Rp0,00	Rp40.200.000,00	0%	(Rp40.200.000,00)
Bantuan ADEM	Rp69.000.000,00	Rp13.800.000,00	80%	Rp55.200.000,00
Banper Tefa	Rp0,00	Rp300.000.000,00	0%	(Rp300.000.000,00)

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Bunper Revitalisasi	Rp1.699.037.000,00	Rp0,00	100%	Rp1.699.037.000,00
Hibah MBG	Rp6.600.000,00	Rp0,00	100%	Rp6.600.000,00
Hibah PSD Pemko Batam	Rp0,00	Rp5.089.648.528,59	0%	(Rp5.089.648.528,59)
Total Pendapatan BLUD dari Hibah LO	Rp1.774.637.000,00	Rp10.495.447.802,59	(491.41 %)	(Rp8.720.810.802,59)

Tabel 22 Pendapatan BLUD dari Hibah LO

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO Tahun 2025 sebesar Rp384.850.000,00 lebih tinggi dari pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO Tahun 2024 sebesar Rp365.530.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Kerjasama Penyewaaan Gedung	Rp146.850.000,00	Rp73.495.000,00	49.95%	Rp73.355.000,00
Kerjasama Penyewaan Kantin	Rp232.000.000,00	Rp267.245.000,00	15.19%	(Rp35.245.000,00)
Pelatihan BSDC	Rp0,00	Rp.21.850.000,00	(0%)	(Rp.21.850.000,00)
Penyewaan Mesin	Rp0,00	Rp.2.940.000,00	(0%)	(Rp.2.940.000,00)
Penyewaan Toko Koperasi	Rp6.000.000,00	Rp0,00	100%	Rp6.000.000,00
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO	Rp384.850.000,00	Rp365.530.000,00	5.02%	Rp19.320.000,00

Tabel 23 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO

iv) Pendapatan BLUD dari APBD LO

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD LO Tahun 2025 sebesar Rp5.829.510.000,00 lebih tinggi dari pendapatan BLUD dari APBD LO Tahun 2024 sebesar Rp5.299.990.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Dana BOS Reguler	Rp.5.669.510.000,00	Rp.5.139.990.900,00	9.08%	Rp529.519.100,00
Dana BOS Kinerja	Rp160.000.000,00	Rp160.000.000,00	0%	Rp0,00
Total Pendapatan	Rp5.829.510.000,00	Rp5.299.990.900,00	9.08%	Rp529.519.100,00

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
BLUD dari APBD LO				

Tabel 24 Pendapatan BLUD dari APBD LO

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2025 sebesar Rp2.911.950,00 lebih rendah dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2024 sebesar Rp3.897.137,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan Bunga	Rp0,00	Rp0,00	0%	Rp0,00
Jasa Giro	Rp2.911.950,00	Rp3.897.137,00	(33.83%)	(Rp985.187,00)
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO	Rp2.911.950,00	Rp3.897.137,00	(33.83%)	(Rp985.187,00)

Tabel 25 Pendapatan BLUD dari Lain lain Pendapatan BLUD yang Sah LO

b) Beban dari kegiatan operasional

1.Belanja Pegawai BLUD LO

Berupa Beban Gaji & Tunjangan dan Beban Tambahan Penghasilan BLUD LO dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp00,00 tidak lebih rendah ataupun tinggi dari beban pegawai BLUD LO tahun 2024 yang sebesar Rp00,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Gaji dan Tunjangan	Rp.00,00	Rp.00,00		-
Beban Tambahan Penghasilan	Rp.00,00	Rp.00,00		-
Total Beban Pegawai BLUD	Rp.00,00	Rp.00,00		-

Tabel 26 Belanja Pegawai BLUD LO

2.Belanja Barang dan Jasa BLUD LO

Beban barang dan jasa LO tahun 2025 terealisasi sebesar Rp6.290.378.094,67 lebih rendah dari dari Beban barang dan jasa LO tahun 2024 yang sebesar Rp16.528.811.400,53 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan
Beban Barang	Rp2.565.646.343,00	Rp3.818.307.558,00	(48.82%)	(Rp1.252.661.215,00)

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan
Beban Jasa	Rp1.024.575.426,00	Rp4.151.241.855,00	(305.17%)	(Rp3.126.666.429,00)
Beban Pemeliharaan	Rp209.066.840,00	Rp1.227.714.120,00	(487.24%)	(Rp1.018.647.280,00)
Beban Langganan Daya dan Jasa	Rp635.425.262,00	Rp0,00	100%	Rp635.425.262,00
Beban Perjalanan Dinas	Rp221.892.018,00	Rp873.690.803,00	(293.75%)	(Rp651.798.785,00)
Beban Penyusutan Aset	Rp1.633.772.205,67	Rp6.457.857.064,53	(295.27%)	(Rp4.824.084.858,86)
Total Beban Barang dan Jasa BLUD	Rp6.290.378.094,67	Rp16.528.811.400,53	(162.76%)	(Rp10.238.433.305,86)

Tabel 27 Belanja Barang dan Jasa BLUD LO

c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan dikelompokkan dalam kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional BLUD SMK Negeri 1 Batam tahun 2025 sebesar Rp0,00.

d) Surplus/defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan beban. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Batam mencatat surplus/Defisit LO sebesar Rp1.950.123.284,33.

5.5 Laporan Arus Kas

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi BLUD SMK Negeri 1 Batam dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi BLUD SMK Negeri 1 Batam pada Tahun 2025 sebesar Rp6.465.864.379,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	**Rp6.465.864.379,00**	**Rp11.180.290.773,00**
Arus Masuk Kas		
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	Rp248.592.429,00	Rp105.073.462,00

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	**Rp6.465.864.379,00**	**Rp11.180.290.773,00**
Pendapatan BLUD dari Hibah	Rp0,00	Rp5.405.790.274,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	Rp384.850.000,00	Rp365.530.000,00
Pendapatan BLUD dari APBD	Rp5.829.510.000,00	Rp5.299.990.900,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	Rp2.911.950,00	Rp3.897.137,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	**Rp6.465.864.379,00**	**Rp11.180.290.773,00**

Tabel 28 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

b. Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi BLUD SMK Negeri 1 Batam selama Tahun 2025 sebesar Rp4.519.107.967,00 terdiri dari :

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	**Rp4.519.107.967,00**	**Rp9.739.784.886,00**
Arus Masuk Kas	Rp6.465.864.379,00	Rp11.180.290.773,00
Pembayaran Pegawai	0.00	0.00
Pembayaran Barang dan Jasa	Rp3.450.893.847,00	Rp7.638.379.963,00
Pembayaran Pemeliharaan	Rp210.896.840,00	Rp1.227.714.120,00
Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	Rp635.425.262,00	Rp0,00
Pembayaran Perjalanan Dinas	Rp221.892.018,00	Rp873.690.803,00
Pembayaran Bunga	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	**Rp4.519.107.967,00**	**Rp9.739.784.886,00**

Tabel 29 Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp1.946.756.412,00 Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**Rp1.946.756.412,00**	**Rp1.440.505.887,00**

Tabel 30 Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset Non-Keuangan lainnya.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan di masa yang akan datang.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 1 Batam pada Tahun 2025 sebesar Rp0,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	**Rp0,00**	**Rp0,00**
Arus Masuk Kas	**Rp0,00**	**Rp0,00**
Penjualan Aset Tetap Tanah	Rp0,00	Rp0,00
Penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp0,00	Rp0,00
Penjualan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp0,00	Rp0,00
Penjualan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp0,00	Rp0,00
Penjualan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Tabel 31 Arus Masuk Kas dari Aktifitas Investasi

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri pada Tahun 2025 sebesar Rp1.994.582.500,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	**Rp1.994.582.500,00**	**Rp2.748.679.740,00**
Belanja Modal Tanah	Rp0,00	Rp0,00

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	**Rp1.994.582.500,00**	**Rp2.748.679.740,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.427.631.500,00	Rp1.984.913.740,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0,00	Rp210.275.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp0,00	Rp161.639.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp566.951.000,00	Rp391.832.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	**Rp1.994.582.500,00**	**Rp2.748.679.740,00**

Tabel 32 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah (Rp1.994.582.500,00) Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(Rp1.994.582.500,00)	(Rp2.748.679.740,00)

Tabel 33 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

3) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari aktivitas Pendanaan BLUD SMK Negeri 1 Batam pada Tahun 2025 sebesar Rp0,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	**Rp0,00**	**Rp0,00**
Arus Masuk Kas	**Rp0,00**	**Rp0,00**
Penerimaan Pinjaman	Rp0,00	Rp0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Tabel 34 Arus Masuk Kas dari Aktifitas Pendanaan

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari aktivitas Pendanaan BLUD SMK Negeri pada Tahun 2025 sebesar Rp60.771.148,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	**Rp.60.771.148,00**	**Rp00,00**
Pembayaran Pokok Pinjaman	Rp0,00	Rp0,00
Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain	Rp0,00	Rp0,00
Penyetoran Ke Kas Negara	Rp60.771.148,00	Rp0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	**Rp60.771.148,00**	**Rp0,00**

Tabel 35 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah (Rp60.771.148,00). Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(Rp60.771.148,00)	(Rp00,00)

Tabel 36 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

4) Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari aktivitas Transitoris BLUD SMK Negeri 1 Batam pada Tahun 2025 sebesar Rp0,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	**Rp1.014.529,00**	**Rp0,00**
Arus Masuk Kas	**Rp1.014.529,00**	**Rp0,00**
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Rp1.014.529,00	Rp0,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	**Rp1.014.529,00**	**Rp0,00**

Tabel 37 Arus Masuk Kas dari Aktifitas Transitoris

b.Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari aktivitas Transitoris BLUD SMK Negeri pada Tahun 2025 sebesar Rp0,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	**Rp0,00**	**Rp00,00**
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Tabel 38 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp1.014.529. Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp1.014.529,00	(Rp00,00)

Tabel 39 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

5) Penurunan Kas Bersih Selama Periode 2025

Penurunan Kas Bersih Selama Periode Tahun 2025 merupakan akumulasi jumlah penurunan kas bersih dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris.

Selama Tahun Anggaran 2025 terjadi penurunan kas bersih sebesar Rp107.582.707,00 yang terdiri dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.946.756.412,00, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar (Rp1.994.582.500,00), Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar (Rp60.771.148,00) dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp1.014.529,00. Perbandingan Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kenaikan /(Penurunan) Kas Bersih	(Rp107.582.707,00)	(Rp1.308.173.853,00)

Tabel 40 Penurunan Kas Bersih

6) Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025

Saldo akhir kas per 31 Desember 2025 merupakan perhitungan Saldo Awal per 1 Januari 2025 dikurangi dengan penurunan kas bersih selama periode tahun 2025.

Saldo akhir kas di BLUD SMK Negeri 1 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp293.095.057,00 didapat dari perhitungan saldo awal Tahun

2025 sebesar Rp400.677.764,00 ditambah penurunan kas bersih selama periode tahun 2025 sebesar Rp107.582.707,00.

Total Saldo Kas BLUD SMK Negeri 1 Batam Per 31 Desember 2025 sebesar Rp293.095.057,00 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas di BLUD	Rp292.080.528,00	Rp400.045.216,00
Kas Dana BOS	Rp0,00	Rp0,00
Kas Lainnya Setara Kas	Rp1.014.529,00	Rp632.548,00
Saldo Akhir Kas	**Rp293.095.057,00**	**Rp400.677.764,00**

Tabel 41 Saldo Akhir Kas

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

a) Ekuitas awal
b) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti:
   1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
   2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas Akhir

a) Ekuitas Awal

Pada Tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Batam mencatat ekuitas awal sebesar Rp 24.053.924.222,68 yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada laporan Tahun 2025. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jumlah Aset Tahun 2025	Rp24.053.924.222,68
Jumlah Kewajiban Tahun 2025	Rp00,00
Saldo Awal Ekuitas 2025	Rp24.053.924.222.68

Tabel 42 Ekuitas Awal

b) Surplus/Defisit LO

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dalam Laporan Operasional Tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.950.123.284,33.



c) Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar Rp25.943.276.359,01 merupakan saldo kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Total Aset dan Total Kewajiban BLUD SMK Negeri 1 Batam Tahun 2025.

Jumlah Aset Tahun 2025	Rp25.943.276.359,01
Jumlah Kewajiban Tahun 2025	Rp.00
Saldo Akhir Ekuitas 2025	Rp25.943.276.359,01

Tabel 4.3 Ekuitas Akhir

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

BLUD SMK Negeri 1 Batam dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No 1354 Tahun 2021

BLUD SMK Negeri 1 Batam beralamat di Jln Prof DR Hamka no 1 Kibing, Batu Aji, Batam

6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

BLUD SMK Negeri 1 Batam adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nirlaba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat dan Peningkatan kesejahteraan pegawai BLUD dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra BLUD SMK Negeri 1 Batam, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala BLUD SMK Negeri 1 Batam

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun sebagai bentuk tanggung jawab BLUD SMK Negeri 1 Batam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, penyusunan laporan keuangan BLUD juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Secara umum pencapaian kinerja atas sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik, namun begitu masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang masih harus terus dibenahi dan menjadi perhatian oleh BLUD SMK Negeri 1 Batam

Dengan memperhatikan strategisnya peran sekolah dan besarnya tantangan yang dihadapi untuk mendukung Visi Misi Pendidikan Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, BLUD SMK Negeri 1 Batam Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja serta memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan industri. Melalui pendekatan berbasis kompetensi, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta pengelolaan keuangan yang transparan melalui sistem BLUD, sekolah ini berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan lulusan SMK dapat menjadi tenaga kerja yang unggul dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Akhir kata, BLUD SMK Negeri 1 Batam Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan dalam penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban kami dalam menyajikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

Batam, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 1 BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DEDEN SURYANA, M.Pd
Pembina/IVb
NIP. 19750602 200312 2 010

LAPORAN
KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SMK NEGERI 2 BATAM

TAHUN ANGGARAN 2025

(AUDITED)



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
SMK NEGERI 2 BATAM
JL PEMUDA NO 5 BATAM CENTER KOTA BATAM
TELP. 0778 460971 FAX 0778 469761

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **v**

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWAB ..... **vi**

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN ..... **vii**

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH ..... **ix**

C. NERACA ..... **x**

D. LAPORAN OPERASIONAL ..... **xiii**

E. LAPORAN ARUS KAS ..... **xv**

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ..... **xviii**

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 2

1.3 Penangungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Batam 3

1.4 Priode Pelaporan Keuangan 3

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 3

BAB II POFIL BLUD SMK NEGERI 2 BATAM

2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 2 Batam 5

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 2 Batam 6

2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Neferi 2 Batam 6

BAB III INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Tahun Anggaran 2024 7
3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi 8

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Akuntansi 10
4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan..... 10
4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 10
4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 10
4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan 11
4.6 Kebijakan Akuntasni Belanja 11
4.7 Kebijakan Akuntansi Kas 11
4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan 12
4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap 12
4.10 Kebijakam Akuntansi Kewajiban 13

BAB V RINCIAN POS POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 Penjelasan Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran 14
5.2 Penjelasan Pos Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 17
5.3 Neraca 17
5.4 Laporan Operasional 22
5.5 Laporan Arus Kas 25
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas 28

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi 30
6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas..... 30

BAB VII PENUTUP 31

LAMPIRAN 32

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Anggaran dan Realisasi Program/ Kegiatan BLUD SMK Negeri 2 Batam 6
Tabel. 2 Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target BLUD SMK Negeri 2 Batam Tahun 2025 7
Tabel. 3 Pendapatan LRA 14
Tabel. 4 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 14
Tabel. 5 Pendapatan BLUD dari Hibah 15
Tabel. 6 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain 15
Tabel. 7 Pendapatan BLUD dari APBD 16
Tabel. 8 Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah 16
Tabel. 9 Belanja Pegawai BLUD 16
Tabel. 10 Belanja Barang dan Jasa BLUD 16
Tabel. 11 Belanja Modal BLUD 17
Tabel. 12 Kas di Bendahara BLUD 18
Tabel. 13 Kas di Bendahara BOS 18
Tabel. 14 Persediaan 18
Tabel. 15 Peralatan dan Mesin 19
Tabel. 16 Gedung dan Bangunan 20
Tabel. 17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 20
Tabel. 18 Aset Tetap Lainnya 21
Tabel. 19 Aset Lainnya 21
Tabel. 20 Ekuitas 22
Tabel. 21 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO 22
Tabel. 22 Pendapatan BLUD dari Hibah LO 23
Tabel. 23 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO 23
Tabel. 24 Pendapatan BLUD dari APBD LO 23
Tabel. 25 Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah LO 24
Tabel. 26 Belanja Pegawai BLUD LO 24
Tabel. 27 Belanja Barang dan Jasa BLUD..... 24
Tabel. 28 Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi 25
Tabel. 29 Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi 26
Tabel. 29.1 Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi 26
Tabel. 30 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi..... 26
Tabel. 31 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi..... 27
Tabel. 31.1 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi..... 27

Tabel. 32 Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Priode 2025 28
Tabel. 32.1 Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Priode 2025 28

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. BLUD SMK Negeri 2 Batam adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Batam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kami berharap dengan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) di Provinsi Kepulauan Riau.

Batam, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 2 BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Drs. Refio, M.Pd
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670101 199802 1 006

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan SMK Negeri 2 Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (iii) Neraca; (iv) Laporan Operasional (LO); (v) Laporan Arus Kas (LAK); (vi) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (vii) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Batam, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 2 BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Drs. Refio, M.Pd
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670101 199802 1 006

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMK NEGERI 2 BATAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN**	**3,532,300,000.00**	**3,121,505,933.00**	**88.37**	**5,542,321,509.00**
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	306,050,000.00	194,320,307.00	63.49	439,580,834.00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0.00	0.00		0.00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	100,000,000.00	105,366,245.00	105.37	91,005,000.00
6	Pendapatan Hibah	210,400,000.00	0.00	0.00	2,555,364,267.00
7	Pendapatan APBN/APBD	2,915,850,000.00	2,820,000,000.00	96.71	2,455,660,000.00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	0.00	1,822,692.00	0.00	711,408.00
	Jumlah PENDAPATAN	**3,532,300,000.00**	**3,121,505,933.00**	**88.37**	**5,542,321,509.00**
9	**BELANJA**				
10	**BELANJA OPERASI**	**2,394,723,974.38**	**1,741,325,509.40**	**72.72**	**4,368,299,631.60**
11	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00
12	Belanja Barang dan Jasa	2,394,723,974.38	1,741,325,509.40	72.72	4,368,299,631.60
13	Bunga	0.00	0.00		0.00
14	Belanja Lain-lain	0.00	0.00		0.00
15	**BELANJA MODAL**	**1,286,957,430.00**	**1,308,596,230.00**	**101.68**	**1,290,415,000.00**
16	Belanja Tanah	0.00	0.00		0.00
17	Belanja Peralatan dan Mesin	819,466,430.00	841,105,230.00	102.64	807,060,000.00
18	Belanja Gedung dan Bangunan	0.00	0.00		0.00
19	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00		0.00
20	Belanja Aset Tetap Lainnya	467,491,000.00	467,491,000.00	100.00	483,355,000.00
21	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00		0.00
	Jumlah BELANJA	**3,681,681,404.38**	**3,049,921,739.40**	**82.84**	**5,658,714,631.60**
	Surplus/ Defisit Sebelum Pembiayaan	**(149,381,404.38)**	**71,584,193.60**	**(47.92)**	**(116,393,122.60)**
22	**PENERIMAAN**				
23	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**149,381,404.38**	**149,381,404.38**	**100.00**	**291,233,842.98**
24	Penggunaan SILPA	149,381,404.38	149,381,404.38	100.00	291,233,842.98

25	Penerimaan dari Divestasi	0.00	0.00		0.00
26	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0.00	0.00		0.00
	Jumlah PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**149,381,404.38**	**149,381,404.38**	**100.00**	**291,233,842.98**
27	**PENGELUARAN**				
28	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
29	Pembayaran Pokok Pinjaman	0.00	0.00		0.00
30	Pengeluaran Penyertaan Modal	0.00	0.00		0.00
31	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0.00	0.00		0.00
	Jumlah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**0.00**	**0.00**		**0.00**
	Pembiayaan Neto	**149,381,404.38**	**149,381,404.38**	**100.00**	**291,233,842.98**
1	2	3	4	5	6
	Surplus/ Defisit	**0.00**	**220,965,597.98**	**(185,359,378,293,981,088.00)**	**174,840,720.38**

Batam, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 2 BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Drs. Refio, M.Pd
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670101 199802 1 006

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMK NEGERI 2 BATAM

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	**7.5.2.1**	174,840,720.38	291,233,842.98
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**7.5.2.2**	0.00	0.00
3	Subtotal (1-2)		174,840,720.38	291,233,842.98
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	**7.5.2.3**	71,584,193.60	(116,393,122.60)
5	Subtotal (3+4)		246,424,913.98	174,840,720.38
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		(25,459,316.00)	0.00
7	Lain-lain		0.00	0.00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	**7.5.2.6**	220,965,597.98	174,840,720.38

Batam, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 2 BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Drs. Refio, M.Pd
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670101 199802 1 006

C. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SMK NEGERI 2 BATAM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	**ASET**	**1.1.**	**30,028,827,604.09**	**29,622,883,497.40**
2	**ASET LANCAR**	**1.1.1.**	**220,978,097.98**	**174,840,720.38**
3	Kas di Bendahara Penerimaan	1.1.1.00.	0.00	0.00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.1.1.01.	0.00	0.00
5	Kas di BLUD	1.1.1.02.	220,965,597.98	149,381,404.38
6	Kas Dana BOS	1.1.1.03.	0.00	0.00
7	Kas Dana P2SP	1.1.1.04.	0.00	0.00
8	Kas Lainnya Setara Kas	1.1.1.05.	12,500.00	25,459,316.00
9	Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum	1.1.1.06.	0.00	0.00
10	Piutang Pajak	1.1.1.07.	0.00	0.00
11	Piutang Retribusi	1.1.1.08.	0.00	0.00
12	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.08.	0.00	0.00
13	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.09.	0.00	0.00
14	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.1.10.	0.00	0.00
15	Belanja dibayar dimuka	1.1.1.11.	0.00	0.00
16	Piutang Lainnya	1.1.1.12.	0.00	0.00
17	Persediaan Badan Layanan Umum	1.1.1.13.	0.00	0.00
18	Aset Untuk Dikonsolidasikan	1.1.1.14.	0.00	0.00
	Jumlah ASET LANCAR		220,978,097.98	174,840,720.38
19	**ASET TETAP**	**1.1.2.**	**29,728,549,006.11**	**29,425,667,777.02**
20	Tanah	1.1.2.01.	13,376,000,000.00	13,376,000,000.00
21	Peralatan dan Mesin	1.1.2.02.	6,789,003,677.00	5,949,338,447.00
22	Gedung dan Bangunan	1.1.2.03.	13,181,444,573.00	13,181,444,573.00



23	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.1.2.04.	77,989,000.00	77,989,000.00
24	Aset Tetap Lainnya	1.1.2.05.	4,965,850,058.00	4,555,187,058.00
25	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.1.2.06.	0.00	0.00
26	Akumulasi Penyusutan	1.1.2.07.	(8,661,738,301.89)	(7,714,291,300.98)
	Jumlah ASET TETAP		29,728,549,006.11	29,425,667,777.02
27	**PIUTANG JANGKA PANJANG**	**1.1.3.**	**0.00**	**0.00**
28	Tagihan Penjualan Angsuran	1.1.3.01.	0.00	0.00
29	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	1.1.3.02.	0.00	0.00
30	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.3.03.	0.00	0.00
	Jumlah PIUTANG JANGKA PANJANG		0.00	0.00
31	**ASET LAINNYA**	**1.1.4.**	**79,313,000.00**	**22,375,000.00**
32	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.1.4.01.	0.00	0.00
33	Dana Kelolaan	1.1.4.02.	0.00	0.00
34	Aset yang dibatasi Penggunaannya	1.1.4.03.	0.00	0.00
1	2	3	4	5
35	Aset Tak Berwujud	1.1.4.04.	22,375,000.00	22,375,000.00
36	Aset Lain - Lain	1.1.4.05.	56,938,000.00	0.00
37	Akumulasi Amortisasi	1.1.4.06.	0.00	0.00
	Jumlah ASET LAINNYA		79,313,000.00	22,375,000.00
	JUMLAH ASET		30,028,840,104.09	29,622,883,497.40
38	**KEWAJIBAN**	**1.2.**	**12,500.00**	**0.00**
39	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**1.2.1.**	**12,500.00**	**0.00**
40	Utang Usaha	1.2.1.01.	0.00	0.00
41	Utang Pihak Ketiga	1.2.1.02.	0.00	0.00
42	Utang Pajak	1.2.1.03.	12,500.00	0.00
43	Utang Kepada KUN	1.2.1.04.	0.00	0.00
44	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.2.1.05.	0.00	0.00
45	Belanja yang masih harus dibayar	1.2.1.06.	0.00	0.00
46	Pendapatan Diterima Dimuka	1.2.1.07.	0.00	0.00

47	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.2.1.08.	0.00	0.00
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		12,500.00	0.00
48	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**1.2.2.**	**0.00**	**0.00**
49	Utang Jangka Panjang	1.2.2.01.	0.00	0.00
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0.00	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN		12.500.00	0.00
50	**EKUITAS**	**1.3.**	**30,028,827,604.09**	**29,622,883,497.40**
51	**EKUITAS**	**1.3.1.**	**30,028,827,604.09**	**29,622,883,497.40**
52	Ekuitas	1.3.1.01.	30,028,827,604.09	29,622,883,497.40
	Jumlah EKUITAS		30,028,827,604.09	29,622,883,497.40
	JUMLAH EKUITAS		30,028,827,604.09	29,622,883,497.40
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		30,028,827,604.09	29,622,883,497.40

Batam, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 2 BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Drs. Refio, M.Pd
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670101 199802 1 006

D. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMK NEGERI 2 BATAM

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	**PENDAPATAN**				
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	194,320,307.00	439,580,834.00	(245,260,527.00)	(126.21)
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0.00	0.00	0.00	
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama	105,366,245.00	91,005,000.00	14,361,245.00	13.63
5	Pendapatan Hibah	169,000,000.00	3,109,273,827.00	(2,940,273,827.00)	(1,739.81)
6	Pendapatan Usaha Lainnya	1,822,692.00	711,408.00	1,111,284.00	60.97
7	Pendapatan APBN/ APBD	2,820,000,000.00	2,455,660,000.00	364,340,000.00	12.92
	Jumlah PENDAPATAN	**3,290,509,244.00**	**6,096,231,069.00**	(2,805,721,825.00)	(85.27)
8	**BEBAN**				
9	Beban Pegawai	0.00	0.00	0.00	
10	Beban Persediaan	920,729,773.00	2,139,955,773.60	(1,219,226,000.60)	(132.42)
11	Beban Jasa	208,710,189.40	1,636,257,357.00	(1,427,547,167.60)	(683.99)
12	Beban Pemeliharaan	176,209,559.00	555,489,500.00	(379,279,941.00)	(215.24)
13	Beban Langganan Daya dan Jasa	432,384,124.00	0.00	432,384,124.00	100.00
14	Beban Perjalanan Dinas	173,735,175.00	369,627,001.00	(195,891,826.00)	(112.75)
15	Beban Penyusutan Aset	947,447,000.91	1,559,925,563.98	(612,478,563.07)	(64.65)
16	Beban Bunga	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah BEBAN	**2,859,215,821.31**	**6,261,255,195.58**	(3,402,039,374.27)	(118.99)
	Surplus/Defisit Operasional	**431,293,422.69**	**(165,024,126.58)**	596,317,549.27	138.26
17	**KEGIATAN NON OPERASIONAL**				
18	Surplus/ Defisit Penjualan Aset Nonlancar	0.00	0.00	0.00	
19	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	0.00	0.00	0.00	

20	Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah Surplus/Defisit Dari KEGIATAN NON OPERASIONAL	**0.00**	**0.00**	0.00	
	Surplus/Defisit Sebelum POS LUAR BIASA	**431,293,422.69**	**(165,024,126.58)**	596,317,549.27	138.26
21	**POS LUAR BIASA**				
22	Pendapatan Luar Biasa	0.00	0.00	0.00	
23	Beban Luar Biasa	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah POS LUAR BIASA	**0.00**	**0.00**	0.00	
	Surplus/Defisit-LO	**431,293,422.69**	**(165,024,126.58)**	596,317,549.27	138.26

Batam, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 2 BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Drs. Refio, M.Pd
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670101 199802 1 006

E. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SMK NEGERI 2 BATAM

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	**Arus Masuk Kas**		
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	194,320,307.00	439,580,834.00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0.00	0.00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	105,366,245.00	91,005,000.00
6	Pendapatan Hibah	0.00	2,555,364,267.00
7	Pendapatan APBN/APBD	2,820,000,000.00	2,455,660,000.00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	1,819.381.00	711,408.00
	Jumlah Arus Masuk Kas	3,121,505,933.00	5,542,321,509.00
9	**Arus Keluar Kas**		
10	Pembayaran Pegawai	0.00	0.00
11	Pembayaran Barang dan Jasa	980,842,651.40	3,979,437,536.00
12	Pembayaran Pemeliharaan	176,209,559.00	19,235,094.60
13	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	432,384,124.00	0.00
14	Pembayaran Perjalanan Dinas	151,889,175,00	369,627,001.00
15	Pembayaran Bunga	0.00	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas	1,741,325,509.40	4,368,299,631.60
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi	1,380,180,423.60	1,174,021,877.40
16	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
17	**Arus Masuk Kas**		
18	Penjualan atas Tanah	0.00	0.00
19	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0.00	0.00
20	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0.00	0.00



21	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00
22	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00
23	Penjualan Aset Lainnya	0.00	0.00
24	Penerimaan dari Divestasi	0.00	0.00
25	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0.00	0.00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0.00	0.00
26	**Arus Keluar Kas**		
27	Perolehan Tanah	0.00	0.00
28	Perolehan Peralatan dan Mesin	841,105,230.00	807,060,000.00
1	2	3	4
29	Perolehan Gedung dan Bangunan	0.00	0.00
30	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00
31	Perolehan Aset Tetap Lainnya	467,491,000.00	483,355,000.00
32	Perolehan Aset Lainnya	0.00	0.00
33	Pengeluaran Penyertaan Modal	0.00	0.00
34	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0.00	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas	1,308,596,230.00	1,290,415,000.00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(1,308,596,230.00)	(1,290,415,000.00)
35	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**		
36	**Arus Masuk Kas**		
37	Penerimaan Pinjaman	0.00	0.00
38	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0.00	0.00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0.00	0.00
39	**Arus Keluar Kas**		
40	Pembayaran Pokok Pinjaman	0.00	0.00
41	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0.00	0.00
42	Penyetoran ke Kas Negara	25,459,316.00	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas	25,459,316.00	0.00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(25,459,316.00)	0.00
43	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**		
44	**Arus Masuk Kas**		
45	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12,500.00	0.00
	Jumlah Arus Masuk Kas	12,500.00	0.00

46	**Arus Keluar Kas**		
47	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0.00	0.00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	12,500.00	0.00
48	**Kenaikan/ Penurunan Kas BLU**	46,137,877.60	(116,393,122.60)
49	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLU**	174,840,720.38	291,233,842.98
50	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU**	220,978,097.98	174,840,720.38

Batam, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 2 BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Drs. Refio, M.Pd
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670101 199802 1 006

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMK NEGERI 2 BATAM

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Ekuitas Awal		29,622,883,497.40	29,479,177,623.98
2	Surplus/Defisit-LO		431,293,422.69	(165,024,126.58)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		(25,349,316.00)	308,730,000.00
4	Koreksi Nilai Persediaan		0.00	0.00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		0.00	0.00
6	Lain-lain		(25,459,316.00)	308,730,000.00
7	Ekuitas Akhir		**30,028,827,604.09**	**29,622,883,497.40**

Batam, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 2 BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Drs. Refio, M.Pd
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670101 199802 1 006

BAB I PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan Keuangan BLUD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran ;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan BLUD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala BLUD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan BLUD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

.

1.1 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SMK Negeri 2 Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan RiauTahun 2024.
17. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

18. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Batam Tahun 2025, adalah tanggungjawab sepenuhnya BLUD SMK Negeri 2 Batam, dalam hal ini adalah Pimpinan BLUD SMK Negeri 2 Batam.

1.4 Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Batam tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Batam tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (*Subsequent Event*) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Batam tahun 2026. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2026.

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Batam adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Batam
- 1.4 Periode Pelaporan Keuangan
- 1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Profil BLUD SMK Negeri 2 Batam
- 2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 2 Batam
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 2 Batam
- 2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 2 Batam tahun 2025

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Asumsi dasar Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- 4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja

4.7 Kebijakan Akuntansi Kas
4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan
4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban
Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
5.1 Laporan Realisasi Anggaran
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3 Neraca
5.4 Laporan Operasional
5.5 Laporan Arus Kas
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
5.7 Catatan Atas Laporan Keuangan
Bab VI Penjelasan atas informasi – Informasi non Keuangan
6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan
Bab VII Penutup

BAB II PROFIL BLUD SMK NEGERI 2 BATAM

2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 2 Batam

Data bisa diperoleh dari RENSTRA SekolahMenengah Kejuruan 2 Batam tahun 2021-2026.

BLUD SMK Negeri 2 Batam memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten serta tenaga ahli yang mendukung pelaksanaan *Teaching Factory (TEFA)*. SDM yang tersedia meliputi:

1. Tenaga Pendidik (Guru Produktif dan Normatif):
   - Guru bersertifikasi keahlian industri sesuai bidang kompetensi.
   - Guru mata pelajaran umum yang mendukung kurikulum berbasis kompetensi.
   - Instruktur dari dunia industri yang terlibat dalam program pelatihan siswa.
2. Tenaga Kependidikan:
   - Staf administrasi yang mengelola keuangan dan operasional BLUD.
   - Teknisi laboratorium dan bengkel untuk mendukung kegiatan praktik.
   - Tenaga keamanan dan kebersihan untuk menjaga lingkungan sekolah yang kondusif.
3. Kemitraan dengan Industri:
   - Mengundang praktisi industri sebagai instruktur tamu.
   - Menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk program magang dan penyerapan tenaga kerja.
   - Mengembangkan skema sertifikasi kompetensi yang diakui dunia usaha dan industri.

Sebagai SMK BLUD yang berbasis *Teaching Factory* (TEFA), sekolah telah memiliki berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran berbasis produksi dan layanan industri, di antaranya:

1. Ruang Kelas dan Laboratorium:
   - Ruang kelas berbasis IT untuk pembelajaran teori.
   - Laboratorium komputer untuk pembelajaran informatika.
   - Perpustakaan sebagai pusat referensi dan literasi siswa.
2. Workshop dan Bengkel TEFA:
   - Ruang pratek pariwisata untuk kegiatan pemanduan wisata, ticketing, dan tour planning.
   - Dapur produksi kuliner yang dilengkapi dengan peralatan skala industri.
   - Workshop perhotelan untuk kegiatan praktek pembelajaran perhotelan yang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar industri.
   - Workshop Busana untuk kegiatan praktek siswa berupa teknik menjahit dan fashion desain.
   - Salon Bussania untuk kegiatan praktek siswa kecantikan.
3. Fasilitas Pendukung:
   - Betuah Edutel SMKN 2 Batam.

- Edutravel Aira Mandiri SMKN 2 Batam
- Ruang pemasaran produk hasil Teaching Factory.
- Area publik seperti kantin sekolah yang dikelola bersama sebagai bengkel pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan.

Sebagai BLUD, SMK memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan Teaching Factory. Sumber dana sekolah berasal dari:

1. Dana BOS dan APBD:
   - Digunakan untuk operasional sekolah, gaji guru, serta pengadaan bahan ajar dan alat praktik.
2. Pendapatan dari Unit Usaha TEFA:
   - Hasil penjualan produk dari unit Teaching Factory.
   - Jasa layanan seperti laundry, permak pakaian, layanan kecantikan, dan katering.
   - Kerjasama dengan pihak lain berupa penyewaan meetingroom, bus, mobil sekolah,kantin dan gallery kewirausahaan.
3. Bantuan dari Pemerintah dan Swasta:
   - Hibah atau bantuan dari pemerintah untuk pengembangan kurikulum dan fasilitas.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 2 Batam

Data bisa diperoleh dari RENSTRA Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Batam tahun 2021-2026

2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 2 Batam

Tabel.1 Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan BLUD SMK Negeri 2 Batam

No	Unit Teaching Factory (TEFA)	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Keterangan
1	**TEFA Usaha Layanan Pariwisata**	Tiketing dan Tur	88.590.000,00	7.095.607,00	8,1	Penerimaan berupa harga tiket system order daring.
2	**TEFA Perhotelan**	Jasa laundry dan penyewaan kamar hotel	8.410.000,00	7.354.000,00	87,44	Renovasi di beberapa ruangan kamar dan restoran, sehingga tidak maksimal dalam jasa penyewaan.
3	**TEFA Kuliner**	Produksi roti, donat, kukis, dan katering	198.600.000,00	175.220.700,00	88,23	Ada beberapa bahan baku substitusi yang dapat dimaksimalkan
4	**TEFA Busana**	Jasa jahit dan permak pakaian	6.050.000,00	275.000,00	4,55	Belum optimal dalam pemasaran ke masyarakat
5	**TEFA Kecantikan & SPA**	Jasa salon	4.400.000,00	4.375.000,00	99,43	Belum optimal dalam pemasaran ke masyarakat

BAB III INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja pada BLUD SMK, pada laporan keuangan ini digunakan sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat managemen yang digunakan untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran dan tujuan, untuk mewujudkan misi dan visi organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut akan disajikan data kinerja BLUD SMK Negeri 2 Batam Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel.2 Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target BLUD SMK Negeri 2 Batam Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
A. Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa					
1	Persentase kelulusan siswa	100%	99,73%	99,73%	0,27% siswa tidak lulus karena tidak menyelesaikan PKL
2	Rata-rata nilai Ujian Kompetensi Keahlian (UKK)	≥ 80	84,0	105%	Mencapai target
3	Persentase siswa yang memperoleh sertifikasi kompetensi industri	90%	95%	105%	Beberapa siswa belum lulus uji sertifikasi
4	Persentase lulusan yang bekerja sesuai kompetensi dalam 6 bulan	50%	62,30%	124,6%	Melebihi target, keterserapan lulusan di dunia kerja berjalan baik
5	Persentase lulusan yang berwirausaha	10%	4,70%	47%	Siswa banyak yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
B. Kinerja Keuangan dan Unit Usaha BLUD					
6	Persentase pendapatan unit usaha BLUD terhadap biaya operasional sekolah	30%	10,85%	36,17%	Pendapatan BLUD dari jasa layanan belum optimal
7	Efisiensi penggunaan dana BLUD sesuai rencana kerja	90%	84,92%	94,36%	Anggaran Cukup terserap dengan baik dan efektif
C. Kinerja Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)					
8	Jumlah kerja sama aktif dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	5 mitra	5 mitra	100%	Tercapai
9	Persentase siswa yang menjalani magang industri	100%	100%	100%	Semua siswa telah menjalani magang
10	Jumlah produk atau jasa unggulan dari Teaching Factory (TEFA)	5 produk	5 produk	100%	Tercapai
D. Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan					

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
11	Kepuasan siswa dan orang tua terhadap layanan pendidikan	85%	85%	100%	Tercapai
12	Jumlah guru produktif bersertifikasi industri	75%	98,51%	131%	Hampir semua guru sudah sertifikasi

Berdasarkan tabel pencapaian, secara keseluruhan SMK BLUD telah mencapai rata-rata 95,24% dari target yang ditetapkan. Beberapa indikator bahkan melebihi target, seperti wirausaha lulusan, jumlah mitra industri, dan kepuasan siswa. Namun, ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, seperti pencapaian pendapat usaha BLUD dan jumlah guru bersertifikasi industri. Untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menjaga dan meningkatkan kemitraan dengan industri untuk meningkatkan jumlah lulusan yang bekerja sesuai kompetensi.
2. Optimalisasi pemasaran unit usaha BLUD untuk meningkatkan pendapatan sekolah.
3. Pengembangan produk Teaching Factory agar lebih kompetitif di pasar.
4. Memotivasi guru produktif untuk dapat menyelesaikan program sertifikasinya.

Dengan perbaikan strategi ini, diharapkan SMK BLUD dapat mencapai 98% target di tahun mendatang.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Adapun hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target realisasi antara lain :

b. Hambatan dalam Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa

1. Kurangnya kesiapan siswa dalam ujian sertifikasi industri
   - Tidak semua siswa memiliki kesiapan yang cukup untuk lulus uji sertifikasi.
   - Waktu Praktek kerja Lapangan (PKL) yang berdekatan dengan uji kompetensi keahlian mengakibatkan banyak siswa yang tidak maksimal dalam mengikutinya.
2. Tingkat kelulusan yang belum 100%
   - Siswa tidak menyelesaikan PKL sehingga tidak memenuhi syarat untuk kelulusan.
   - Kurangnya motivasi belajar dan disiplin dari siswa tersebut.
3. Penyerapan lulusan ke dunia kerja belum optimal
   - Persaingan ketat di dunia kerja sehingga tidak semua lulusan langsung terserap.
   - Masih ada lulusan yang lebih memilih bekerja di luar bidang keahlian mereka.
   - Munculnya tren baru bagi lulusan yang cenderung berganti-ganti pekerjaan terkait dengan perbandingan *take home pay* yang didapat antar perusahaan sejenis.

b. Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan dan Unit Usaha BLUD
   1. Pendapatan unit usaha BLUD belum mencapai target
      - Persaingan dengan produk atau jasa dari industri komersial yang lebih mapan.
      - Kurangnya strategi pemasaran dan branding produk/jasa SMK BLUD.
      - Kurangnya konstitensi dari hasil produksi sehingga mengakibatkan ekspansi dari pemasaran produk tidak optimal.
      - Kurang semangat dari pengelola TEFA terkait dengan insentif tambahan yang belum bisa diperoleh saat terdapat pesanan TEFA khususnya apabila pada waktu libur dan diluar jam kerja wajib/lembur.
   2. Efisiensi penggunaan dana BLUD
      - Masih ada beberapa program yang belum berjalan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas.
      - Keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah atau sumber pendanaan lain.

c. Hambatan dalam Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)
   1. Jumlah produk unggulan Teaching Factory belum optimal
      - Keterbatasan dalam sumber daya manusia dalam bagian produksi dan quality control (QC) dalam kegiatan produksi hasil TEFA.
      - Produk belum sepenuhnya sesuai standar pasar, sehingga masih butuh perbaikan dalam kualitas dan pemasaran.

   2. Kemitraan industri masih perlu diperluas
      - Kurangnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja.
      - Kurangnya peranan industri dalam hal pendampingan produksi TEFA yang selaras dengan produk industry tersebut.

d. Hambatan dalam Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan
   1. Tingkat kepuasan siswa dan orang tua belum maksimal
      - Beberapa siswa merasa materi pembelajaran masih kurang relevan dengan dunia kerja.
      - Orang tua belum sepenuhnya memahami konsep BLUD di SMK, sehingga kurang mendukung program sekolah.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Akuntansi adalah BLUD SMK Negeri 2 Batam Provinsi Kepulauan Riau.

4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas;
b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Batam Provinsi Kepulauan Riau adalah:

a) ***Basis Kas*** untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam ***Laporan Realisasi Anggaran***
Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat Kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

b) ***Basis akrual*** untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam ***Neraca***
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

c) ***Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran*** berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

d) ***Basis akrual untuk neraca*** berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas;

4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengakuan dan pengukuran atas transaksi kejadian ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan ini adalah:

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.
   Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD , adalah sebagai berikut:
   a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
   b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
   c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
   d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.
2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
   Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Batam tahun 2025, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat Diterima pada Rekening Kas Umum. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum untuk seluruh transaksi setelah dilakukan pengesahan definitif bendahara. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

4.7 Kebijakan Akuntansi Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas secara umum diakui jika memenuhi kriteria:

a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.

4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari:

- Barang Konsumsi;
- Bahan untuk pemeliharaan;
- Suku cadang;
- Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
- Bahan baku;
- Barang dalam proses/setengah jadi;

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal; diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.

4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat

telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.

4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

BAB V RINCIAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang telah disusun BLUD SMK Negeri 2 Batam periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini:

5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan – LRA

Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 2 Batam mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp **3.290.509.244,00** atau sebesar 93,15% dari target yang ditetapkan sebesar Rp **3.532.300.000,00** sebagaimana ikhtisar sebagai berikut:

Tabel. 3 Pendapatan LRA

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	306.050.000,00	194.320.307,00	63,49	498.286.448,00
Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat	210.400.000,00	0	0	1.085.300.473,00
Pendapatan BLUD dari Hibah Tidak terikat	0	0	0	3.717.000.000,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	100.000.000,00	105.366.245,00	105,36	91,005,000,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	0	1.822.692,00	100	711,408,00
Pendapatan BLUD dari APBN/APBD	2,915,850,000,00	2,820,000,000,00	100	2.455.660.000,00
TOTAL PENDAPATAN BLUD	**3.532.300.000,00**	**3,290,509,244,00**	**88.37**	**5,542,321,509,00**

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Tahun 2025 sebesar Rp 194.320.307,00 atau 63,49,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 306.050.000 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 4 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Pendapatan TEFA ULP	88.590.000,00	7.095.607,00	8,01	227.074.100
Pendapatan TEFA Perhotelan	8.410.000,00	7.354.000,00	87,44	22.209.438,30
Pendapatan TEFA Kuliner	198.600.000,00	175.220.700,00	88,23	308.880.259,80
Pendapatan TEFA Busana	6.050.000,00	275.000,00	4,55	7.509.613,80
Pendapatan TEFA TKKR	4.400.000,00	4.375.000,00	99,43	5.769.406,20
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	**306.050.000,00**	**194.320.307,00**	**63,49**	**571.442.817,98**

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah Tahun 2025 sebesar Rp169.000.000,00 atau 80,32% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp210.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 5 Pendapatan BLUD dari Hibah

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Hibah SPP/ Hibah Tidak Terikat	-	-0	-	1.470.063.794,00
Hibah Kementerian/ Hibah Terikat	210.400.000,00	0	0	1.085.300.473,00
Total Pendapatan BLUD dari Hibah	**210.400.00,00**	**0**	**0**	**2.555.364.267,00**

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Tahun 2025 sebesar Rp 105.366.245,00 atau 105,4% lebih tinggi dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 100.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 6 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Kerjasama Kantin	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00
Kerjasama Gallery KWH	30.000.000,00	30.000.000,00	30,00	12.000.000,00
Kerjasama Lainnya	10.000.000,00	15.366.245,00	153,00	19.000.000,00
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	**100.000.000,00**	**105.366.245,00**	**105,366%**	**91.005.000,00**

iv) Pendapatan BLUD dari APBD

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD Tahun 2025 sebesar Rp2.815.850.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp2.815.850.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 7 Pendapatan BLUD dari APBN/APBD

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Dana BOSP	2.815.850.000,00	2.815.850.000,00	100,00	2.455.660.000,00
Retribusi Kamar Hotel	100.000.000,00	4.150.000,00	4,15	0
Total Pendapatan BLUD dari APBD	**2.915.850.000,000**	**2.820.800.000,00**	**96,71**	2.455.660.000,00

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp 1.822.692,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 8 Pendapatn BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Pendapatan BLUD Lain-lain yang Sah	0,00	1.822.692,00	0,00	711.408,00
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	**0,00**	**1.822.682,00**	**0,00**	**0,00**

b. Belanja

1. Belanja Pegawai BLUD

Berupa Belanja Gaji & Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan BLUD dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00 % dari total anggaran belanja pegawai BLUD yang sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 9 Belanja Pegawai BLUD

	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Pegawai BLUD	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp 1.910.328.820,40 atau 79,77% dari total anggaran belanja barang dan jasa yang sebesar Rp 2.394.723.974,38 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 10 Belanja Barang dan Jasa BLUD

	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Barang	1.050.060.444,38	886,635,773.00	84,44
Belanja Jasa	809.961.398,00	526,565,624,40	75,27

Belanja Pemeliharaan	190.875.957,00	176.209.559,00	92.32
Belanja Perjalanan Dinas	343.826.175,00	151.889.175,00	44,18
Total Belanja Barang dan Jasa BLUD	**2.394.723.974,38**	**1.741.325.509,40**	**72,72**

3. Belanja Modal BLUD

Belanja modal BLUD terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp 1.308.596.230,00 atau 101,68% dari total anggaran belanja modal peralatan dan mesin yang sebesar Rp 1.286.957.430,00, belanja modal gedung dan bangunan yang terealisasi sebesar Rp atau 0,00% dari total anggaran belanja modal gedung dan bangunan yang sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 11 Belanja Modal BLUD

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	819.466.430,00	841.105.230,00	102,64	807.060.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	467.491.000,00	467.491.000,00	100	483.355.000,00
Total Belanja Modal BLUD	**1.286.957.439,000**	**1.308.596.230,00**	**101,68**	**1.290.415.000,00**

5.2 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo awal SAL pada tahun 2025 sebesar RP 174.840.720,38 dan dilakukan pengembalian SILPA SPP Rp.25.349.316 pada Januari 2025 sehingaa Rp.149.381.404,38 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

2) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan digunakan dalam rangka membiayai defisit tahun anggaran berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar 71.584.193,98 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

3) Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SiLPA tahun 2025 sebesar Rp220.965.597,98

5.3 Neraca

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- Berupa kas/setara kas dan persediaan

Aset Lancar sebesar Rp 220.965.597,98 yang dimiliki BLUD SMK Negeri 2 Batam per 31 Desember 2025 terdiri dari:

a. Kas di Bendahara BLUD

Kas BLUD adalah semua bentuk penerimaan dan pengeluaran uang tunai atau setara kas yang dikelola oleh SMK Negeri 2 Batam dalam rangka menjalankan operasionalnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, dan pendapatan lainnya. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BLUD sebesar RP 220.965.597,98 dengan rincian :

Tabel. 12 Kas di Bendahara BLUD

Uraian	Jumlah
Kas di Bank	
Rek Bank Penerimaan Norek 1.060.100.040 (BRK Syariah)	215.105.036,00
Rek Bank Pengeluaran Norek 1.060.100.041 (BRK Syariah)	5.416.857,00
Kas Tunai	443.704,98
Total Kas di Bendahara BLUD	**220.965.597,97**

b. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan kas dibawah pengelolaan bendahara BOS yang bersumber dari pemerintah untuk mendukung operasional sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan tanpa membebani peserta didik. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BOS sebesar RP 0,00 dengan rincian :

Tabel. 13 Kas di Bendahara BOS

Uraian	Jumlah
Kas di Bank	
Rek Bank BOS Norek 1863826155 (BRK Syariah)	0,00
Kas Tunai	0,00
Total Kas di Bendahara BOS	**0,00**

c. Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan kas yang berasal dari sumber-sumber lain. Kas Lainnya pada BLUD SMK Negeri 2 Batam berasal dari pungutan SPP kepada para siswa yang sejak bulan Juli 2025 sudah tidak dipungut lagi. saldo Kas Lainnya pada tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00.

d. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 terdiri dari :

Tabel. 14 Persediaan

Uraian	Jumlah
Persediaan Barang Habis Pakai	0,00
- Bahan	0,00
- Suku Cadang	0,00
Persediaan BarangTidak Habis Pakai	0,00
Total Persediaan	**0,00**

2. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh pelayanan umum. Aset tetap sebesar Rp 29.728.549.006,11 per 31 Desember 2025 merupakan nilai perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan yang pengadaannya bersumber dari pengelolaan dana BOS dan BLUD.

a. Tanah

Nilai aset tanah BLUD SMK Negeri 2 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp 13.376.000.000,00 dan tidak terdapat penambahan aset tetap tanah selama tahun 2025.

b. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin BLUD SMK Negeri 2 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp 6.789.003.677,00 meningkat sebesar Rp 839.665.230,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp 5.949.338.447,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel. 15 Peralatan dan Mesin

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**Rp** 5.949.338.447,00
Penambahan :	
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 839.665.230,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp 0,00
- Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kementerian	Rp 0
Total Penambahan	**Rp 839.665.230,00**
Pengurangan :	

Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	Rp 0,00
Total Pengurangan :	**Rp 0,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**Rp 6.789.003.677,00**

c. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan BLUD SMK Negeri 2 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp 13.181.444.573,00 meningkat sebesar Rp 0,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp 13.181.444.573,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel. 16 Gedung dan Bangunan

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**Rp 13.181.444.573,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 0,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp 0,00
- Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kementerian	Rp 0,00
Total Penambahan	**Rp 0,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	Rp 0,00
Total Pengurangan :	**Rp 0,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**Rp 13.181.444.573,00**

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD SMK Negeri 2 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp 77.989.000,00 meningkat sebesar Rp 0,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp 77.989.000,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel. 17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**Rp 77.989.000,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 0,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0,00

Uraian	Jumlah
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp 0,00
- Hibah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kementerian	Rp 0,00
Total Penambahan	**Rp 0,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	Rp 0,00
Total Pengurangan :	**Rp 0,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**Rp 77.989.000,00**

e. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Aset Tetap Lainnya BLUD SMK Negeri 2 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp 4.965.850.058,00 meningkat sebesar Rp 410.663.000,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp 4.555.187.058,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel. 18 Aset Tetap Lainya

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	**Rp 4.555.187.058,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 410.663.000,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp 0,00
- Hibah Aset Tetap Lainnya dari Kementerian	Rp 0,00
Total Penambahan	**Rp 410.663.000,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Lainnya	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	Rp 0,00
Total Pengurangan :	**Rp 0,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya	**Rp 4.965.850.058,00**

3. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya dapat berupa Aset Tidak Berwujud dan Aset Rusak Berat/Tidak Digunakan Lagi dalam Operasional Kegiatan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 2 Batam mencatat Aset Lainnya sebesar Rp79.313.000,00 terdiri dari Aset Tidak Berwujud (Software, dll) sebesar Rp 22.375.000,00 dan Aset Rusak Berat/Tidak Digunakan Lagi dalam Operasional Kegiatan sebesar Rp 56.938.000,00. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel. 19 Aset Lainya

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Lainnya	**Rp 22.375.000,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Lainnya	Rp 0,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp 0,00
- Hibah Aset Lainnya dari Kementerian	Rp 0,00
- Aset Rusak Berat/Tidak	RP.56.938.000,0
Total Penambahan	**Rp 0,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Lainnya	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	Rp 0,00
Total Pengurangan :	**Rp 0,00**
Saldo Akhir Aset Lainnya	**Rp 79.313.000,00**

4. Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 2 Batam tidak memiliki kewajiban.

5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD SMK Negeri 2 Batam pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pada Tahun 2025 Ekuitas adalah sebesar Rp 30.028.827.604,09.

Tabel. 20 Ekuitas

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Ekuitas	**Rp 29.622.883.497,40**
- Surplus/Defisit LO	Rp405.944.106,69
- Koreksi Ekuitas	Rp 0,00
Saldo Ekuitas Akhir	**Rp 30.299.127.996,19**

5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional
b) Beban dari kegiatan operasional
c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
d) Pos luar biasa
e) Surplus/defisit LO

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional

Pendapatan LO dari kegiatan operasional terdiri dari :

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2025 sebesar Rp 194.320.307,00 lebih rendah dari Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 21 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan TEFA ULP	7.095.607,00	174.676.134,00	4,1	-167.580.527,00
Pendapatan TEFA Perhotelan	7.354.000,00	17.084.550,00	43,0	-9.730.550,00
Pendapatan TEFA Kuliner	175.220.700,00	237.605.300,00	73,7	-62.384.600,00
Pendapatan TEFA Busana	275.000,00	5.776.750,00	4,8	-5.501.750,00
Pendapatan TEFA Kecantikan & SPA	4.375.000,00	4.438.100,00	98,6	-63.100,00
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO	**194.320.307,00**	**439.580.834,00**	**44,21**	**-245.260.527,00**

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2025 sebesar Rp 169.000.000,00 lebih rendah dari pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2024 sebesar Rp2.555.364.267,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 22 Pendapatan BLUD dari Hibah LO

Uraian	Realisasi 2025(Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Hibah SPP	0,00	1.470.063.794,00	0,00	0,00)
Hibah Kementerian	169.000.000,00	1.085.300.473,00	642,18	-916.300.473,00
Total Pendapatan BLUD dari Hibah LO	**169.000.000,00**	**2.555.364.267,00**	**1.512,04**	**–2.386.364.267,00**

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO Tahun 2025 sebesar Rp 105,366,245.00 lebih tinggi-dari pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain sebesar Rp 91,005,000.00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 23 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Kerjasama Kantin	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00
Kerjasama Gallery Kewirausahaan	30.000.000,00	12.000.000,00	40%,00	18.000.000,00
Kerjasama Penyewaan Lainnya	15.366.245,00	19.005.000,00	123,68	-3.638.755,000
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO	**105.366.245,00**	**91.005.000,00**	**86,371**	**14.361.245,000**

iv) Pendapatan BLUD dari APBD LO

Realisasi pendapatan BLUD dari APBN/APBD LO Tahun 2025 sebesar Rp2.820.000.000,00 lebih tinggi dari pendapatan BLUD dari APBD LO sebesar Rp 2.455.660,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 24 Pendapatan BLUD dari APBD LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Dana BOSP	2.815.850.000,00	2.455.660.000,00	12.79	360.190.000,00
Dana RETRIBUSI KAMAR HOTEL	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Pendapatan BLUD dari APBD LO	**2.820.000.000,00**	**2.455.660.000,00**	**12,79**	**360.190.000,00**

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2025 sebesar Rp 711.408,00 lebih rendah dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO sebesar Rp66.896.328,58 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 25 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Jasa Giro/ Sewa Kantin	1.822.692,00	711.408,00	60,96	1.111.284
Sewa Gedung/Aula/Lab		0,00	0,00	0,00
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO	**1.822.692,00**	**711.408,00**	**60,96**	**1.111.284**

b) Beban dari kegiatan operasional

1. Belanja Pegawai BLUD LO

Berupa Beban Gaji & Tunjangan dan Beban Tambahan Penghasilan BLUD LO dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp 0,00 lebih tinggi/rendah dari beban pegawai BLUD LO tahun 2023 yang sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 26 Belanja Pegawai BLUD LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Beban Pegawai BLUD	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Beban barang dan jasa LO tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 2,859,215,821.31 lebih tinggi dari dari Beban barang dan jasa LO tahun 2024 yang sebesar Rp 6,261,255,195.58 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 27 Belanja Barang dan Jasa BLUD LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan
Beban Barang	920.729.773,00	2.139.955.773,60	232,42	-1.219.226.000,60
Beban Jasa	641.094.313,40	1.636.257.357,00	255,23	-995.163.043,60
Beban Pemeliharaan	176.209.559,00	555.489.500,00	315,24	-379.279.941,00
Beban Perjalanan Dinas	173.735.175,00	369.627.001,00	212,75	-195.891.826,00
Beban Penyusutan Aset	947.447.000,91	1.559.925.563,98	164,65	-612.478.563,07
Total Beban Barang dan Jasa BLUD	**2.859.215.821,31**	**6.261.255.195,58**	**218,99**	**-3.402.039.374,27**

c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan dikelompokkan dalam kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional BLUD SMK Negeri 2 Batam tahun 2025 sebesar Rp. **0,00**

d) Surplus/defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan beban. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 2 Batam mencatat Defisit LO sebesar Rp **431.293.422,69**.

5.5 Laporan Arus Kas

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi BLUD SMK Negeri 2 Batam dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi BLUD SMK Negeri 2 Batam pada Tahun 2025 sebesar Rp3.290.509.244,00 yang terdiri dari:

Tabel. 28 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	194.320.307,00	439.580.834,00
Pendapatan BLUD dari Hibah	0	2.555.364.267,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	105.355.245,00	91.005.000,00
Pendapatan BLUD dari APBN/APBD	2.820.000.000,00	2.455.660.000,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	1.822.692,00	711.408,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	**3.121.509.244,00**	**5.542.321.509,00**

b. Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi BLUD SMK Negeri 2 Batam selama Tahun 2025 sebesar Rp 1.910.328.820,40 terdiri dari:

Tabel. 29 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		
Belanja Pegawai	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	980,842,651.40	3,979,437,536.00
Belanja Pemeliharaan	176.209.559,00	19.235.094,60
Belanja PerjalananDinas	151,889,175.00	369,627,001.00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	**1.910.328.820,40**	**4.368.299.631,60**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp 1.380.180.423,60 Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

Tabel. 29.1 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.380.180.423,60	1.174.021.877,40

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset Non-Keuangan lainnya.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan di masa yang akan datang.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 2 Batam pada Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 yang terdiri dari:

Tabel. 30 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan Aset Tetap Tanah	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		
Penjualan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	**0,00**	**0,00**

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 2 Batam pada Tahun 2025 sebesar Rp 1.308.596.230,00 yang terdiri dari:

Tabel. 31 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Inveastasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	841.105.230,00	807.060.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	467.491.000,00	483.355.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	**1,308,596,230.00**	**1,290,415,000.00**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp (1.308.596.230,00). Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

Tabel. 31.1 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Inveastasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.308.596.230,00)	(1.290.415.000,00)

3) Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Periode 2025

Kenaikan/(penurunan) Kas Bersih Selama Periode Tahun 2025 merupakan akumulasi jumlah kenaikan/(penurunan) kas bersih dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris.

Selama Tahun Anggaran 2025 terjadi kenaikan/penurunan kas bersih sebesar Rp 46.137.377,60 yang terdiri dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp 1.380.180.423,60 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp (1.308.596.230,00). Perbandingan Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih tahun 2025 dan 2024 adalah:

Tabel. 32 Kenaikan/ Penurunan Kas Bersih Selama Periode 2025

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	46,137,377.60	-116.393.122,60

Berikut :

Tabel. 32.1 Kenaikan/ Penurunan Kas Bersih SelamaPeriode 2025

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas di BLUD	246,424,913.98	149.381.404,38
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(25.459.316,00)	25.459.316,00
Saldo Akhir Kas	**220,978,097.98**	**174.840.720,38**

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

a) Ekuitas awal
b) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti:
   1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
   2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas Akhir

a) Ekuitas Awal

Pada Tahun 2025 BLUD SMK Negeri 2 Batam mencatat ekuitas awal sebesar Rp 29,622,883,497.40 yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada laporan Tahun 2025. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jumlah Aset Tahun 2024 Rp 29,622,883,497.40
- Jumlah Kewajiban Tahun 2024 Rp 0,00
- **Saldo Awal Ekuitas 2024** **Rp 29,622,883,497.40**

b) Surplus/Defisit LO

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dalam Laporan Operasional Tahun 2025 tercatat sebesar Rp **431,293,422.69**.

c) Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar **Rp30.028.827.604,09** merupakan saldo kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Total Aset dan Total Kewajiban BLUD SMK Negeri 2 Batam Tahun 2025.

- Jumlah Aset Tahun 2025	Rp 30,028,827,604.09
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025	Rp 0,00
- Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp 25.459.316,00
- **Saldo Awal Ekuitas 2025**	**Rp 30,028,827,604.09**

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

BLUD SMK Negeri 2 Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 1354 Tahun 2021

BLUD SMK Negeri 2 Batam beralamat di Jl. Pemuda No.5 Batam Center

6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

BLUD SMK Negeri 2 Batam adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nirlaba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di , dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra BLUD SMK Negeri 2 Batam , sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala BLUD SMK Negeri 2 Batam

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Batam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 disusun sebagai bentuk tanggung jawab BLUD SMK Negeri 2 Batam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, penyusunan laporan keuangan BLUD juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Secara umum pencapaian kinerja atas sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik, namun begitu masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang masih harus terus dibenahi dan menjadi perhatian oleh BLUD SMK Negeri 2 Batam.

Dengan memperhatikan strategisnya peran sekolah dan besarnya tantangan yang dihadapi untuk mendukung Visi Misi Pendidikan Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, SMK Negeri 2 Batam Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja serta memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan industri. Melalui pendekatan berbasis kompetensi, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta pengelolaan keuangan yang transparan melalui sistem BLUD, sekolah ini berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan lulusan SMK dapat menjadi tenaga kerja yang unggul dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Akhir kata, BLUD SMK Negeri 2 Batam Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan dalam penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban kami dalam menyajikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

Batam, 25 Mei 2026

KEPALA SEKOLAH
SMK NEGERI 2 BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Drs. REFIO, M.Pd
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 19670101 199802 1 006

LAPORAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SMK NEGERI 3 BATAM
TAHUN 2025
(AUDITED)

SMK Negeri 3 Batam
JL. Letjen S.Parman Kelurahan Duriangkang
Kecamatan Sei Beduk
Telepon 0078-7379430

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR LAMPIRAN iv
KATA PENGANTAR v
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWAB vi
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN vii
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH ix
C. NERACA x
D. LAPORAN OPERASIONAL xi
E. LAPORAN ARUS KAS xiii
F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS xv
G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 2
1.3 Penangungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 3
1.4 Priode Pelaporan Keuangan 3
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 3
BAB II POFIL BLUD SMK NEGERI 3 BATAM
2.1 Sumber Daya BLUD SMK NEGERI 3 Batam 5
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK NEGERI 3 Batam 6
2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK NEGERI 3 Batam 6
BAB III INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET
3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025 8
3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi . 9
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Akuntansi 11
4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan 11
4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusuna Laporan Keuangan 11
4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 11
4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan 12
4.6 Kebijakan Akuntasni Belanja 12
4.7 Kebijakan Akuntansi Kas 13
4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan 13
4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap 13
4.10 Kebijakam Akuntansi Kewajiban 14
BAB V RINCIAN POS POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 Penjelasan Pos pos Laporan Realisasi Anggaran 15
5.2 Penjelasan Pos pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 19
5.3 Neraca 19
5.4 Laporan Operasional 24
5.5 Laporan Arus Kas 27

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas 31
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi 32
6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas 32
BAB VII PENUTUP 33
LAMPIRAN .....

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Anggaran dan Realisasi Program/ Kegiatan BLUD
SMK NEGERI 3 Batam .....
Tabel. 2 Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target
BLUD SMK NEGERI 3 Batam Tahun 2025 .....
Tabel. 3 Pendapatan LRA .....
Tabel. 4 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan .....
Tabel. 5 Pendapatan BLUD dari Hibah .....
Tabel. 6 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain .....
Tabel. 7 Pendapatan BLUD dari APBD .....
Tabel. 8 Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah .....
Tabel. 9 Belanja Pegawai BLUD .....
Tabel. 10 Belanja Barang dan Jasa BLUD .....
Tabel. 11 Belanja Modal BLUD .....
Tabel. 12 Kas di Bendahara BLUD .....
Tabel. 13 Kas di Bendahara BOS .....
Tabel. 14 Persediaan .....
Tabel. 15 Peralatan dan Mesin .....
Tabel. 16 Gedung dan Bangunan .....
Tabel. 17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan .....
Tabel. 18 Aset Tetap Lainnya .....
Tabel. 19 Aset Lainnya .....
Tabel. 20 Ekuitas .....
Tabel. 21 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO .....
Tabel. 22 Pendapatan BLUD dari Hibah LO .....
Tabel. 23 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO .....
Tabel. 24 Pendapatan BLUD dari APBD LO .....
Tabel. 25 Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah LO .....
Tabel. 26 Belanja Pegawai BLUD LO .....
Tabel. 27 Belanja Barang dan Jasa BLUD .....
Tabel. 28 Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi .....
Tabel. 29 Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi .....
Tabel. 29.1 Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi .....
Tabel. 30 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi .....
Tabel. 31 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi .....
Tabel. 31.1 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi .....
Tabel. 32 Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Priode 2025 .....
Tabel. 33 Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025 .....

DAFTAR LAMPIRAN

REKENING KORAN

KATA PENGANTAR

Sebagimana diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Menteri/ Pimpinan Lemabaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. BLUD SMK NEGERI 3 Batam adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan BLUD SMK NEGERI 3 Batam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah sebagaimana telah dibuah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kami berharap dengan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (Good Govermance) di Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD SMK N 3 BATAM

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

H.Agus Sahrir, M.Pd
Pembina Tingkat I/IV/b
NIP. 19690814 199903 1 008

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan BLUD SMK NEGERI 3 Batam, yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (iii) Neraca: (iv) Laporan Operasional; (v) Laporan Arus Kas (LAK) ; (VI) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) ; dan (VII) Catatan atas Laporan Keuangan Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Tanjungpinang,25Mei 2026
PIMPINAN BLUD SMK N 3 BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

H.Agus Sahrir,M.Pd
Pembina Tingkat I/IV/b
NIP. 196908141999031008

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BLUD SMK NEGERI 3 BATAM

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN**	**5,955,971,000.00**	**3,724,075,194.00**	**62.53**	**0.00**
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	80,000,000.00	80,000,000.00	100.00	0.00
6	Pendapatan Hibah	2,232,181,000.00	0.00	0.00	0.00
7	Pendapatan APBN/APBD	3,643,690,000.00	3,643,690,000.00	100.00	0.00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	100,000.00	385,194.00	385.19	0.00
	Jumlah PENDAPATAN	**5,955,971,000.00**	**3,724,075,194.00**	**62.53**	**0.00**
9	**BELANJA**				
10	**BELANJA OPERASI**	**2,464,576,816.00**	**2,211,539,616.00**	**89.73**	**0.00**
11	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Belanja Barang dan Jasa	2,464,576,816.00	2,211,539,616.00	89.73	0.00
13	Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Belanja Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
15	**BELANJA MODAL**	**3,491,394,184.00**	**1,491,380,384.00**	**42.72**	**0.00**
16	Belanja Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Belanja Peralatan dan Mesin	1,193,614,184.00	1,069,081,384.00	89.57	0.00
18	Belanja Gedung dan Bangunan	1,875,481,000.00	0.00	0.00	0.00
19	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Belanja Aset Tetap Lainnya	422,299,000.00	422,299,000.00	100.00	0.00
21	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00

	Jumlah BELANJA	**5,955,971,000.00**	**3,702,920,000.00**	**62.17**	**0.00**
	SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM PEMBIAYAAN	0.00	21,155,194.00	0.00	0.00
22	**PENERIMAAN**				
23	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24	Penggunaan SILPA	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Penerimaan dari Divestasi	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
27	**PENGELUARAN**				
28	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
29	Pembayaran Pokok Pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Pengeluaran Penyertaan Modal	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Pembiayaan Neto	0.00	0.00	0.00	0.00
	Surplus/Defisit	0.00	21,155,194.00	0.00	0.00

Kepulauan Riau, 25 Mei 2026

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

H. Agus Sahrir, M.Pd

NIP.196908141999031008

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BLUD SMK NEGERI 3 BATAM

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	**7.5.2.1**	0.00	0.00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**7.5.2.2**	0.00	0.00
3	Subtotal (1-2)		0.00	0.00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	**7.5.2.3**	21,155,194.00	0.00
5	Subtotal (3+4)		21,155,194.00	0.00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0.00	0.00
7	Lain-lain		0.00	0.00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	**7.5.2.6**	21,155,194.00	0.00

Kepulauan Riau, 25 Mei 2026

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

H. Agus Sahrir, M.Pd

NIP.196908141999031008

C. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BLUD SMK NEGERI 3 BATAM

NERACA PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	**ASET**	**1.1.**	**27,159,089,235.41**	**0.00**
2	**ASET LANCAR**	**1.1.1.**	**21,275,194.00**	**0.00**
3	Kas di Bendahara Penerimaan	1.1.1.00.	0.00	0.00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.1.1.01.	0.00	0.00
5	Kas di BLUD	1.1.1.02.	21,155,194.00	0.00
6	Kas Dana BOS	1.1.1.03.	0.00	0.00
7	Kas Dana P2SP	1.1.1.04.	0.00	0.00
8	Kas Lainnya Setara Kas	1.1.1.05.	120,000.00	0.00
9	Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum	1.1.1.06.	0.00	0.00
10	Piutang Pajak	1.1.1.07.	0.00	0.00
11	Piutang Retribusi	1.1.1.08.	0.00	0.00
12	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.08.	0.00	0.00
13	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.09.	0.00	0.00
14	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.1.10.	0.00	0.00
15	Belanja dibayar dimuka	1.1.1.11.	0.00	0.00
16	Piutang Lainnya	1.1.1.12.	0.00	0.00
17	Persediaan Badan Layanan Umum	1.1.1.13.	0.00	0.00
18	Aset Untuk Dikonsolidasikan	1.1.1.14.	0.00	0.00
	Jumlah ASET LANCAR		21,275,194.00	0.00
19	**ASET TETAP**	**1.1.2.**	**26,864,974,041.41**	**0.00**
20	Tanah	1.1.2.01.	5,858,000,000.00	0.00
21	Peralatan dan Mesin	1.1.2.02.	8,808,825,474.68	0.00
22	Gedung dan Bangunan	1.1.2.03.	9,645,477,147.00	0.00
23	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.1.2.04.	74,557,000.00	0.00
24	Aset Tetap Lainnya	1.1.2.05.	3,850,132,230.00	0.00
25	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.1.2.06.	0.00	0.00
26	Akumulasi Penyusutan	1.1.2.07.	(1,372,017,810.27)	0.00
	Jumlah ASET TETAP		26,864,974,041.41	0.00
27	**PIUTANG JANGKA PANJANG**	**1.1.3.**	**0.00**	**0.00**
28	Tagihan Penjualan Angsuran	1.1.3.01.	0.00	0.00
29	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	1.1.3.02.	0.00	0.00
30	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.3.03.	0.00	0.00
	Jumlah PIUTANG JANGKA PANJANG		0.00	0.00
31	**ASET LAINNYA**	**1.1.4.**	**272,840,000.00**	**0.00**
32	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.1.4.01.	0.00	0.00
33	Dana Kelolaan	1.1.4.02.	0.00	0.00

34	Aset yang dibatasi Penggunaannya	1.1.4.03.	0.00	0.00

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
35	Aset Tak Berwujud	1.1.4.04.	271,590,000.00	0.00
36	Aset Lain – Lain	1.1.4.05.	1,250,000.00	0.00
37	Akumulasi Amortisasi	1.1.4.06.	0.00	0.00
	Jumlah ASET LAINNYA		272,840,000.00	0.00
	JUMLAH ASET		27,159,089,235.41	0.00
38	**KEWAJIBAN**	**1.2.**	**120,000.00**	**0.00**
39	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**1.2.1.**	**120,000.00**	**0.00**
40	Utang Usaha	1.2.1.01.	0.00	0.00
41	Utang Pihak Ketiga	1.2.1.02.	0.00	0.00
42	Utang Pajak	1.2.1.03.	120,000.00	0.00
43	Utang Kepada KUN	1.2.1.04.	0.00	0.00
44	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.2.1.05.	0.00	0.00
45	Belanja yang masih harus dibayar	1.2.1.06.	0.00	0.00
46	Pendapatan Diterima Dimuka	1.2.1.07.	0.00	0.00
47	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.2.1.08.	0.00	0.00
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		120,000.00	0.00
48	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**1.2.2.**	**0.00**	**0.00**
49	Utang Jangka Panjang	1.2.2.01.	0.00	0.00
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0.00	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN		120,000.00	0.00
50	**EKUITAS**	**1.3.**	**27,158,969,235.41**	**0.00**
51	**EKUITAS**	**1.3.1.**	**27,158,969,235.41**	**0.00**
52	Ekuitas	1.3.1.01.	27,158,969,235.41	0.00
	Jumlah EKUITAS		27,158,969,235.41	0.00
	JUMLAH EKUITAS		27,158,969,235.41	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		27,159,089,235.41	0.00

Kepulauan Riau, 25 Mei 2026

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

H.Agus Sahrir, M.Pd

NIP.196908141999031008

D. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BLUD
SMK NEGERI 3 BATAM

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	**PENDAPATAN**				
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	0.00	0.00	0.00	
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0.00	0.00	0.00	
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	100.00
5	Pendapatan Hibah	2,232,181,000.00	0.00	2,232,181,000.00	100.00
6	Pendapatan Usaha Lainnya	385,194.00	0.00	385,194.00	100.00
7	Pendapatan APBN/ APBD	3,643,690,000.00	0.00	3,643,690,000.00	100.00
	Jumlah PENDAPATAN	**5,956,256,194.00**	**0.00**	5,956,256,194.00	100.00
8	**BEBAN**				
9	Beban Pegawai	0.00	0.00	0.00	
10	Beban Persediaan	1,637,580,057.00	0.00	1,637,580,057.00	100.00
11	Beban Jasa	291,602,300.00	0.00	291,602,300.00	100.00
12	Beban Pemeliharaan	48,717,812.00	0.00	48,717,812.00	100.00
13	Beban Langganan Daya dan Jasa	478,936,670.00	0.00	478,936,670.00	100.00
14	Beban Perjalanan Dinas	226,357,777.00	0.00	226,357,777.00	100.00
15	Beban Penyusutan Aset	1,372,017,810.27	0.00	1,372,017,810.27	100.00
16	Beban Bunga	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah BEBAN	**4,055,212,426.27**	**0.00**	4,055,212,426.27	100.00
	Surplus/Defisit Operasional	**1,901,043,767.73**	**0.00**	1,901,043,767.73	100.00
17	**KEGIATAN NON OPERASIONAL**				
18	Surplus/ Defisit Penjualan Aset Nonlancar	0.00	0.00	0.00	
19	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	0.00	0.00	0.00	
20	Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah Surplus/Defisit Dari KEGIATAN NON OPERASIONAL	**0.00**	**0.00**	0.00	
	Surplus/Defisit Sebelum POS LUAR BIASA	**1,901,043,767.73**	**0.00**	1,901,043,767.73	100.00
21	**POS LUAR BIASA**				
22	Pendapatan Luar Biasa	0.00	0.00	0.00	
23	Beban Luar Biasa	0.00	0.00	0.00	

	Jumlah POS LUAR BIASA	**0.00**	**0.00**	0.00	
	Surplus/Defisit-LO	**1,901,043,767.73**	**0.00**	1,901,043,767.73	100.00

Kepulauan Riau, 25 Mei 2026

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



H. Agus Sahrir, M.Pd

NIP.196908141999031008

E. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BLUD SMK NEGERI 3 BATAM
LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

No	Uraian	2025	2024
1	2	3	4
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	**Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat**	**0.00**	**0.00**
4	**Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan**	**0.00**	**0.00**
5	**Pendapatan Hasil Kerja Sama**	**80,000,000.00**	**0.00**
6	**Pendapatan Hibah**	**0.00**	**0.00**
7	**Pendapatan APBN/APBD**	**3,643,690,000.00**	**0.00**
8	**Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah**	**385,194.00**	**0.00**
9	Arus Keluar Kas		
10	**Pembayaran Pegawai**	**0.00**	**0.00**
11	**Pembayaran Barang dan Jasa**	**1,466,023,357.00**	**0.00**
12	**Pembayaran Pemeliharaan**	**48,717,812.00**	**0.00**
13	**Pembayaran Langganan Daya dan Jasa**	**478,936,670.00**	**0.00**
14	**Pembayaran Perjalanan Dinas**	**217,861,777.00**	**0.00**
15	**Pembayaran Bunga**	**0.00**	**0.00**
	Jumlah Arus Keluar Kas	**2,211,539,616.00**	**0.00**
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi	**1,512,535,578.00**	**0.00**
16	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
17	Arus Masuk Kas		
18	**Penjualan atas Tanah**	**0.00**	**0.00**
19	**Penjualan atas Peralatan dan Mesin**	**0.00**	**0.00**
20	**Penjualan atas Gedung dan Bangunan**	**0.00**	**0.00**
21	**Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan**	**0.00**	**0.00**
22	**Penjualan Aset Tetap Lainnya**	**0.00**	**0.00**
23	**Penjualan Aset Lainnya**	**0.00**	**0.00**
24	**Penerimaan dari Divestasi**	**0.00**	**0.00**
25	**Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas**	**0.00**	**0.00**
26	Arus Keluar Kas		

27	**Perolehan Tanah**	**0.00**	**0.00**
28	**Perolehan Peralatan dan Mesin**	**1,069,081,384.00**	**0.00**
29	**Perolehan Gedung dan Bangunan**	**0.00**	**0.00**
30	**Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan**	**0.00**	**0.00**
31	**Perolehan Aset Tetap Lainnya**	**422,299,000.00**	**0.00**
32	**Perolehan Aset Lainnya**	**0.00**	**0.00**
33	**Pengeluaran Penyertaan Modal**	**0.00**	**0.00**
34	**Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas**	**0.00**	**0.00**
	Jumlah Arus Keluar Kas	**1,491,380,384.00**	**0.00**
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi	**-1,491,380,384.00**	**0.00**
35	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
36	Arus Masuk Kas		
37	**Penerimaan Pinjaman**	**0.00**	**0.00**
38	**Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain**	**0.00**	**0.00**
39	Arus Keluar Kas		
40	**Pembayaran Pokok Pinjaman**	**0.00**	**0.00**
41	**Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain**	**0.00**	**0.00**
42	**Penyetoran ke Kas Negara**	**0.00**	**0.00**
	Jumlah Arus Keluar Kas	**0.00**	**0.00**
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	**0.00**	**0.00**
43	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
44	Arus Masuk Kas		
45	**Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**	**120,000.00**	**0.00**
46	Arus Keluar Kas		
47	**Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**	**0.00**	**0.00**
	Jumlah Arus Keluar Kas	**0.00**	**0.00**
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	**120,000.00**	**0.00**
48	Kenaikan/ Penurunan Kas BLU	21,275,194.00	0.00
49	Saldo Awal Kas Setara Kas BLU	0.00	0.00
50	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU	21,275,194.00	0.00

Kepulauan Riau, 25 Mei 2026

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

H.Agus Sahrir, M.Pd

NIP.196908141999031008

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BLUD SMK NEGERI 3 BATAM

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Ekuitas Awal		0.00	0.00
2	Surplus/Defisit-LO		1,901,043,767.73	0.00
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		25,257,925,467.68	0.00
4	Koreksi Nilai Persediaan		0.00	0.00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		0.00	0.00
6	Lain-lain		0.00	0.00
7	Ekuitas Akhir		**27,158,969,235.41**	**0.00**

Kepulauan Riau, 25 Mei 2026
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

H.Agus Sahrir, M.Pd
NIP.1969081419990310

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan Keuangan BLUD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran ;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan BLUD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala BLUD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk

memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan BLUD

menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SMK Negeri 3 Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan RiauTahun 2024.

17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2025 tentang perbuhaan kedua atas peraturan gubernur nomor 75 tahun 2022. Tentang kebijakan akuntansi pemerintahan daerah.
18. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 3 Batam Tahun 2025, adalah tanggungjawab sepenuhnya BLUD SMK Negeri 3 Batam, dalam hal ini adalah Pimpinan BLUD SMK Negeri 3 Batam.

1.4 Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 3 Batam tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2025, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 3 Batam tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (*Subsequent Event*) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 3 Batam tahun 2025. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2025.

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 3 Batam adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 3 Batam
- 1.4 Periode Pelaporan Keuangan
- 1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Profil BLUD SMK Negeri 3 Batam
- 1.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 3 Batam
- 1.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 3 Batam
- 1.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 3 Batam tahun 2025

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Asumsi dasar Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- 4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja
- 4.7 Kebijakan Akuntansi Kas
- 4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban
Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
5.1 Laporan Realisasi Anggaran
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3 Neraca
5.4 Laporan Operasional
5.5 Laporan Arus Kas
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
5.7 Catatan Atas Laporan Keuangan
Bab VI Penjelasan atas informasi – Informasi non Keuangan
6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan
Bab VII Penutup

BAB II

BLUD SMKN NEGERI 3 BATAM

2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 3 Batam

Data bisa diperoleh dari RENSTRA Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 3 Batam tahun 2025.

BLUD SMK Negeri 3 Batam memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten serta tenaga ahli yang mendukung pelaksanaan *Teaching Factory (TEFA)*. SDM yang tersedia meliputi:

1. Tenaga Pendidik (Guru Produktif dan Normatif):
   - Guru bersertifikasi keahlian industri sesuai bidang kompetensi.
   - Guru mata pelajaran umum yang mendukung kurikulum berbasis kompetensi.
   - Instruktur dari dunia industri yang terlibat dalam program pelatihan siswa.
2. Tenaga Kependidikan:
   - Staf administrasi yang mengelola keuangan dan operasional BLUD.
   - Teknisi laboratorium dan Workshop untuk mendukung kegiatan praktik.
   - Tenaga keamanan dan kebersihan untuk menjaga lingkungan sekolah yang kondusif.
3. Kemitraan dengan Industri:
   - Mengundang praktisi industri sebagai instruktur tamu.
   - Menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk program magang dan penyerapan tenaga kerja.
   - Mengembangkan skema sertifikasi kompetensi yang diakui dunia usaha dan industri.

Sebagai SMK BLUD yang berbasis *Teaching Factory* (TEFA), sekolah telah memiliki berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran berbasis produksi dan layanan industri, di antaranya:

1. Ruang Kelas dan Laboratorium:
   - Ruang kelas berbasis IT untuk pembelajaran teori.
   - Laboratorium komputer untuk pembelajaran informatika.
   - Laboratorium Fisika
   - Perpustakaan sebagai pusat referensi dan literasi siswa.
2. Workshop dan Lab TEFA:
   - Workshop Teknik Kendaran Ringan.
   - Workshop Teknik Sepeda Motor
   - Workshop Teknik Pemanasan Tata Udara dan Pendingin
   - Workshop Teknik Elektronika Indurstri
   - Workshop Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi
   - Workshop Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
3. Fasilitas Pendukung:
   - Ruang Praktik SMK Negeri 3 Batam.
   - Alat Praktik SMK Negeri 3 Batam
   - Area publik seperti kantin sekolah yang dikelola bersama dengan pihak Ketiga sebagai bentuk Kerjasama.

Sebagai BLUD, SMK memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan Teaching Factory. Sumber dana sekolah berasal dari:

1. Dana BOS dan APBD:
   - Digunakan untuk operasional sekolah, gaji guru, serta pengadaan bahan ajar dan alat praktik.
2. Pendapatan dari Unit Usaha TEFA:
   - Jasa Layanan dari Teaching Factory..
   - Kerjasama dengan pihak lain berupa penyewaan Kantin.
3. Bantuan dari Pemerintah dan Swasta:
   - Hibah atau bantuan dari pemerintah untuk pengembangan kurikulum dan fasilitas.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 3 Batam

Data bisa diperoleh dari RENSTRA Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Batam tahun 2025-2029.

2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 3 Batam

Tabel Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
BLUD SMK Negeri 3 Batam

No	Unit Teaching Factory (TEFA)	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Keterangan
1	**TEFA Teknik Kendaraan Ringan**	Jasa Service Mobil	0	0	0%	Kegiatan TEFA masih dalam pengembangan
2	**TEFA Sepeda Motor**	Jasa Service Sepeda Motor	0	0	0%	Kegiatan TEFA masih dalam pengembangan
3	**Pendapatan TEFA Teknik Pemanasan, Tata Udara dan Pendingin.**	Jasa Service AC	0	0	0%	Kegiatan TEFA masih dalam pengembangan
4	**TEFA Teknik Elektronik Industri**	Jasa Pembuatan Running Teks 1 Color	0	0	0%	Kegiatan TEFA masih dalam pengembangan
5	**TEFA Teknik Komputer dan Jaringan**	Jasa Maintenance Komputer	0	0	0%	Kegiatan TEFA masih dalam pengembangan

No	Unit Teaching Factory (TEFA)	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Keterangan
6	**TEFA Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan**	Jasa Desain Kontruksi Bangunan	0	0	0%	Kegiatan TEFA masih dalam pengembangan

BAB III

INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja pada BLUD SMK, pada laporan keuangan ini digunakan sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat managemen yang digunakan untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran dan tujuan, untuk mewujudkan misi dan visi organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut akan disajikan data kinerja BLUD SMK Negeri 3 Batam Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target BLUD SMK Negeri 3 Batam Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
A. Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa					
1	Persentase kelulusan siswa	100%	100%	100%	Mencapai target
2	Rata-rata nilai Ujian Kompetensi Keahlian (UKK)	≥ 100%	99,9%	0,01%	0,1 % tidak kompeten
3	Persentase siswa yang memperoleh sertifikasi kompetensi industri	100%	98%	0,01%	Beberapa siswa belum lulus uji sertifikasi
4	Persentase lulusan yang bekerja sesuai kompetensi dalam 6 bulan	100%	40 %	40 %	60 % bekerja tidak sesuai dengan kompetensi
5	Persentase lulusan yang berwirausaha	50%	35%	85%	Ada siswa yang kulia dan bekerja di perusahaan
B. Kinerja Keuangan dan Unit Usaha BLUD					
6	Persentase pendapatan unit usaha BLUD terhadap biaya operasional sekolah	0%	0%	0%	Tidak ada Pendapatan BLUD dari jasa layanan untuk Operasional Sekolah
7	Efisiensi penggunaan dana BLUD sesuai rencana kerja	85%	75%	90%	Ada bebrapa rencna kerja belum tercapai
C. Kinerja Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)					
8	Jumlah kerja sama aktif dengan Dunia	6 Mitra	5 Mitra	90 %	1 Jurusan belum ada MOU untuk TEFA

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
	Usaha dan Dunia Industri (DUDI)				
9	Persentase siswa yang menjalani magang industri	100%	100%	100%	Semua siswa telah menjalani magang
10	Jumlah produk atau jasa unggulan dari Teaching Factory (TEFA)	6 Jasa	6 Jasa	100%	Setiap tefa memiliki Jasa tapi belum Jalan/beroperasi
D. Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan					
11	Kepuasan siswa dan orang tua terhadap layanan pendidikan	85%	85%	100%	Tercapai
12	Jumlah guru produktif bersertifikasi industri	100%	47,22%	47,22%	52.78% belum tercapai.

Berdasarkan tabel pencapaian, secara keseluruhan SMK BLUD telah mencapai rata-rata 98% dari target yang ditetapkan. Beberapa indikator bahkan melebihi target, seperti wirausaha lulusan, jumlah mitra industri, dan kepuasan siswa. Namun, ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, seperti pencapaian pendapat usaha BLUD dan jumlah guru bersertifikasi industri. Untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menjaga dan meningkatkan kemitraan dengan industri untuk meningkatkan jumlah lulusan yang bekerja sesuai kompetensi.
2. Optimalisasi pemasaran unit usaha BLUD untuk meningkatkan pendapatan sekolah.
3. Pengembangan produk Teaching Factory agar lebih kompetitif di pasar.
4. Memotivasi guru produktif untuk dapat menyelesaikan program sertifikasinya.

Dengan perbaikan strategi ini, diharapkan SMK BLUD dapat mencapai 100% target di tahun mendatang.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Adapun hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target realisasi antara lain :

a. Hambatan dalam Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa
   1. Kurangnya kesiapan siswa dalam ujian sertifikasi industri
      - Tidak semua siswa memiliki kesiapan yang cukup untuk lulus uji sertifikasi.
      - Waktu Praktek kerja Lapangan (PKL) yang berdekatan dengan uji kompetensi keahlian mengakibatkan banyak siswa yang tidak maksimal dalam mengikutinya.

   2. Tingkat kelulusan 100%
      - Siswa menyelesaikan PKL sehingga memenuhi syarat untuk kelulusan.
      - Motivasi belajar dan disiplin dari siswa tersebut.

3. Penyerapan lulusan ke dunia kerja belum optimal
    - Persaingan ketat di dunia kerja sehingga tidak semua lulusan langsung terserap.
    - Masih ada lulusan yang lebih memilih bekerja di luar bidang keahlian mereka.

b. Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan dan Unit Usaha BLUD
1. Pendapatan unit usaha BLUD belum mencapai target
    - Persaingan dengan produk atau jasa dari industri komersial yang lebih mapan.
    - Kurangnya strategi pemasaran dan branding produk/jasa SMK BLUD.
    - Kurangnya konstitensi dari hasil produksi sehingga mengakibatkan ekspansi dari pemasaran produk tidak optimal.
2. Efisiensi penggunaan dana BLUD
    - Masih ada beberapa program yang belum berjalan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas.
    - Keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah atau sumber pendanaan lain.

c. Hambatan dalam Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)
1. Jumlah produk unggulan Teaching Factory belum optimal
    - Keterbatasan dalam sumber daya manusia dalam bagian produksi dan quality control (QC) dalam kegiatan produksi hasil TEFA.
    - Produk belum sepenuhnya sesuai standar pasar, sehingga masih butuh perbaikan dalam kualitas dan pemasaran.
2. Kemitraan industri masih perlu diperluas
    - Kurangnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja.
    - Kurangnya peranan industri dalam hal pendampingan produksi TEFA yang selaras dengan produk industry tersebut.

d. Hambatan dalam Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan
1. Tingkat kepuasan siswa dan orang tua belum maksimal
    - Beberapa siswa merasa materi pembelajaran masih kurang relevan dengan dunia kerja.
    - Orang tua belum sepenuhnya memahami konsep BLUD di SMK, sehingga kurang mendukung program sekolah.
2. Kurangnya jumlah guru bersertifikasi industri
    - Tidak semua guru memiliki kesempatan mengikuti pelatihan atau sertifikasi karena keterbatasan waktu dan biaya.
    - Masih ada kendala administratif dalam proses pengajuan sertifikasi guru ke lembaga industri terkait.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Akuntansi adalah BLUD SMK Negeri 3 Batam Provinsi Kepulauan Riau.

4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas;
b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 3 Batam Provinsi Kepulauan Riau adalah:

a) ***Basis Kas*** untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam ***Laporan Realisasi Anggaran***
Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat Kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

b) ***Basis akrual*** untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam ***Neraca***
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

c) ***Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran*** berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

d) ***Basis akrual untuk neraca*** berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas;

4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengakuan dan pengukuran atas transaksi kejadian ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan ini adalah:

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.

Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD , adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 3 Batam tahun 2025, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat Diterima pada Rekening Kas Umum. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum untuk seluruh transaksi setelah dilakukan pengesahan definitif bendahara. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

4.7 Kebijakan Akuntansi Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas secara umum diakui jika memenuhi kriteria:

a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.

4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari:

- Barang Konsumsi;
- Bahan untuk pemeliharaan;
- Suku cadang;
- Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
- Bahan baku;
- Barang dalam proses/setengah jadi;

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal; diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.

4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;

b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.

4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

BAB V

RINCIAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang telah disusun BLUD SMK Negeri 3 Batam periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini:

5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan – LRA

Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 3 Batam mencatat Realisasi pendapatan BLUD SMKN 3 Batam sebesar **Rp. 3,724,075,194,00** atau sebesar **62.53%** dari target Anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 5,955,971,000.00** sebagaimana ikhtisar sebagai berikut:

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0	0		Rp0,00
Pendapatan dari Hibah Terikat	Rp.2,232,181,000.00	Rp.0,00	0%	Rp0,00
Pendapatan BLUD dari Hibah Tidak terikat	Rp 0,00	Rp0,00	0%	Rp0,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00	100,00%	Rp0,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	Rp. 100,000.00	Rp. 385,194.00	385.19%	Rp0,00
Pendapatan BLUD dari APBD	Rp.3,643,690,000.00	Rp.3,643,690,000.00	100%	Rp0,00
TOTAL PENDAPATAN BLUD	Rp.**5,955,971,000**	Rp.**3,724,075,194,00**	**62,53 %**	Rp0,00

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Tahun 2025 sebesar Rp **0** atau **0%** dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp **0** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%	Realisasi Belanja 2024
Pendapatan TEFA Teknik Kendaraan Ringan	Rp0,00	Rp0,00	0%	Rp0,00
Pendapatan TEFA Teknik Sepeda Motor	Rp0,00	Rp0,00	0%	Rp0,00
Pendapatan TEFA Teknik Pemanasan, Tata Udara dan Pendingin.	Rp0,00	Rp0,00	0%	Rp0,00
Pendapatan TEFA Teknik Elektronika Industri	Rp0,00	Rp0,00	0%	Rp0,00
Pendapatan TEFA Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	Rp0,00	Rp0,00	0%	Rp0,00
Pendapatan TEFA Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	Rp0,00	Rp0,00	0%	Rp0,00
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah Tahun 2025 sebesar **Rp.0.00** atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan **Rp.2,232,181,000.00** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%	Realisasi Belanja 2024
Hibah SPP/ Hibah Tidak Terikat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Hibah Kementerian/ Hibah Terikat	Rp.2,232,181,000.00	Rp.0,00	0,00%	Rp0,00

Uraian	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%	Realisasi Belanja 2024
Total Pendapatan BLUD dari Hibah	**Rp.2,232,181,000.00**	**Rp.0.00**	**100,00%**	**Rp0,00**

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Tahun 2025 sebesar **Rp.80.000.000,00** atau 100 % dari anggaran yang ditargetkan sebesar **Rp.80.000.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%	Realisasi Belanja 2025
Kerjasama Kantin	Rp.80.000.000,00	Rp.80.000.000,00	100 %	Rp0,00
Kerjasama Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	**Rp80.000.000,00**	**Rp80.000.000,00**	100%	Rp0,00

iv) Pendapatan BLUD dari APBD

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 0,00 dengan kesimpulan tidak ada bantuan dari APBD untuk BLUD pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%	Realisasi Belanja 2024
Dana BOSP	Rp.3,643,690,000.00	Rp.3,643,690,000.00	100%	Rp0,00
Total Pendapatan BLUD dari APBD	**Rp.3,643,690,000.00**	**Rp.3,643,690,000.00**	**100%**	Rp0,00

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah (Jasa Giro)

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah (Jasa Giro) Tahun 2025 sebesar Rp**385,194.00** atau 385.19 % dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp **100,000.00** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%	Realisasi Belanja 2024
Pendapatan BLUD Lain-lain yang Sah (Jasa Giro)	**Rp.100,000.00**	Rp**385,194.00**	385.19 %	Rp0,00

Uraian	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%	Realisasi Belanja 2024
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	**Rp.100,000.00**	Rp**385,194.00**	**385.19 %**	**Rp0,00**

b. Belanja

1. Belanja Pegawai BLUD

Berupa Belanja Gaji & Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan BLUD dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % dari total anggaran belanja pegawai BLUD yang sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp0,00	Rp0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan	Rp0,00	Rp0,00	0,00
Total Belanja Pegawai BLUD	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**0,00**

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. **2,211,539,616.00** atau **99,17%** dari total anggaran belanja barang dan jasa yang sebesar **Rp2,464,576,816.00** dengan rincian sebagai berikut :

	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Barang dan Jasa	Rp2.169.831.227	Rp1.944.960.027	89,64
Belanja Pemeliharaan	Rp48,717,812.00	Rp48,717,812.00	100
Belanja Perjalanan Dinas	Rp246,027,777.00	Rp217,861,777.00	88,55
Total Belanja Barang dan Jasa BLUD	**Rp2,464,576,816.00**	**2,211,539,616.00**	**89,73**

3. Belanja Modal BLUD

Belanja modal BLUD terdiri dari peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp**1,069,081,384.00** atau 89,57% dari total anggaran belanja modal peralatan dan mesin yang sebesar Rp**1,193,614,184.00**, belanja modal gedung dan bangunan yang terealisasi sebesar Rp**.0.00** atau 0,00% dari total anggaran belanja modal gedung dan bangunan yang sebesar Rp**1,875,481,000.00,**

belanja modal aset tetap lainnya yang terealisasi sebesar Rp**422,299,000.00** atau 100% dari total Rp**422,299,000.00** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran Pendapatan(Rp)	Realisasi Pendapatan(Rp)	%	Realisasi Belanja 2024
Belanja Modal Peralatan dan mesin	Rp**1,193,614,184.00**,	Rp**1,069,081,384.00**	89,57	Rp0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp**1,875,481,000.00**	Rp**0.00**	0,00	Rp0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp**422,299,000.00**	Rp**422,299,000.00**	100	Rp0,00
Total Belanja Modal BLUD	**Rp3.491.394.194**	**Rp1,491,380,384.00**	**42,72**	Rp0,00

5.2 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo awal SAL pada tahun 2025 sebesar **Rp0,00** merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2025.

2) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan digunakan dalam rangka membiayai defisit tahun anggaran berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp0,00** merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2025.

3) Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SiLPA tahun 2025 sebesar **Rp.21,155,194.00**

5.3 Neraca

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- Berupa kas/setara kas dan persediaan

Aset Lancar sebesar **Rp21.275.194,00** yang dimiliki BLUD SMK Negeri 3 Batam per 31 Desember 2025 terdiri dari:

a. Kas di Bendahara BLUD

Kas BLUD adalah semua bentuk penerimaan dan pengeluaran uang tunai atau setara kas yang dikelola oleh SMK Negeri 3 Batam dalam rangka menjalankan operasionalnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, dan pendapatan lainnya. Pada tahun 2025 saldo di KAS Bendahara Penerimaan BLUD dengan total sebesar **Rp21.155.194,00** dengan rincian :

Uraian	Jumlah
Kas di Bank	
Rek Bank Penerimaan BLUD SMKN 3 Batam Norek 1940100009 (BRK Syariah)	Rp1.053,00
Rek Bank Pengeluaran BLUD SMKN 3 BatamNorek 1940100010 (BRK Syariah)	Rp2.291,00
Rek Bank KAS BLUD SMKN 3 Batam Norek 1940100011 (BRK Syariah)	Rp21.151.850,00
Kas Tunai	0,00
Total Kas di Bendahara BLUD	**Rp21.155.194,00**

b. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan kas dibawah pengelolaan bendahara BOS yang bersumber dari pemerintah untuk mendukung operasional sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan tanpa membebani peserta didik. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp0,00 dengan rincian :

Uraian	Jumlah
Kas di Bank	
Rek Bank Bendahara BOS SMKN 3 Batam Norek 1863826152 (BRK Syariah)	Rp0,00
Kas Tunai	Rp0,00
Total Kas di Bendahara BOS	**Rp0,00**

c. Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan kas yang berasal dari sumber-sumber lain. Kas Lainnya pada BLUD SMK Negeri 3 Batam berasal dari pungutan SPP kepada para siswa yang sejak awal Tahun 2025 sudah tidak dipungut lagi.

d. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar **Rp0,00** terdiri dari :

Uraian	Jumlah
Persediaan Barang Habis Pakai	Rp0,00
- Bahan	Rp0,00
- Suku Cadang	Rp0,00
Persediaan BarangTidak Habis Pakai	Rp0,00
Total Persediaan	**Rp0,00**

2. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh pelayanan umum. Aset tetap sebesar Rp.**26,864,974,041.41** per 31 Desember 2025 merupakan nilai perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan yang pengadaannya bersumber dari pengelolaan dana BOS dan dana SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dan BLUD.

a. Tanah

Nilai aset tanah BLUD SMK Negeri 3 Batam per 31 Desember 2025 sebesar **Rp.5,858,000,000.00**dan tidak terdapat penambahan aset tetap tanah selama tahun 2025 pada BLUD.

b. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin BLUD SMK Negeri 3 Batam per 31 Desember 2025 sebesar **Rp.8,808,825,474.68** ,Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**Rp 0,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 8,808,825,474.68
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp 0,00
- Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kementerian	Rp 0,00
Total Penambahan	Rp8,808,825,474.68
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	Rp 0,00
Total Pengurangan :	**Rp 0,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**Rp 8,808,825,474.68**

c. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan BLUD SMK Negeri 3 Batam per 31 Desember 2025 sebesar **Rp 9,645,477,147.00** tidak ada peningkatan dikarenakan BLUD baru berjalan pada tahun 2025. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**Rp 0,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 9,645,477,147.00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp 0,00
- Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kementerian	Rp 0,00
Total Penambahan	**Rp 9,645,477,147.00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	Rp 0,00
Total Pengurangan :	**Rp 0,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**Rp 0,00**

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD SMK Negeri 3 Batam per 31 Desember 2025 sebesar **Rp 74,557,000.00** Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**Rp 0,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 74,557,000.00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp 0,00
- Hibah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kementerian	Rp 0,00
Total Penambahan	**Rp 74,557,000.00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	Rp 0,00
Total Pengurangan :	**Rp 0,00**

Uraian	Jumlah
Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**Rp 74,557,000.00**

e. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Aset Tetap Lainnya BLUD SMK Negeri 3 Batam per 31 Desember 2025 sebesar **Rp 3,850,132,230.00**. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	**Rp 0,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 3,850,132,230.00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp 0,00
- Hibah Aset Tetap Lainnya dari Kementerian	Rp 0,00
Total Penambahan	**Rp 3,850,132,230.00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Lainnya	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	Rp 0,00
Total Pengurangan :	**Rp 0,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya	**Rp 3,850,132,230.00**

3. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya dapat berupa Aset Tidak Berwujud dan Aset Rusak Berat/Tidak Digunakan Lagi dalam Operasional Kegiatan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 3 Batam mencatat Aset Lainnya sebesar **Rp 272,840,000.00** Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Lainnya	**Rp 0,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Lainnya	Rp **272,840,000.00**
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp 0,00
- Hibah Aset Lainnya dari Kementerian	Rp 0,00
Total Penambahan	**Rp 272,840,000.00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Lainnya	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	Rp 0,00
Total Pengurangan :	**Rp 0,00**
Saldo Akhir Aset Lainnya	**Rp 272,840,000.00**

4. Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 3 Batam memiliki kewajiban hutang pajak sebesar **120.000,00** yang dibayarkan di tahun 2026

5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD SMK Negeri 3 Batam pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pada Tahun 2025 Ekuitas adalah sebesar **Rp 27,158,969,235.41**

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Ekuitas	**Rp 0,00**
- Surplus/Defisit LO	Rp1,901,043,767.73
- Koreksi Ekuitas	Rp 0,00
Saldo Ekuitas Akhir	**Rp 27,158,969,235.41**

5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional
b) Beban dari kegiatan operasional
c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
d) Pos luar biasa
e) Surplus/defisit LO

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional

Pendapatan LO dari kegiatan operasional terdiri dari :

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2025 sebesar **Rp 0,00** lebih tinggi dari Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Pendapatan 2025 (Rp)	Realisasi Pendapatan 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan TEFA Teknik Kendaraan Ringan	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp,00
Pendapatan TEFA Teknik Sepeda Motor	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Pendapatan TEFA Teknik Pemanasan,	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00

Uraian	Realisasi Pendapatan 2025 (Rp)	Realisasi Pendapatan 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Tata Udara dan Pendingin				
Pendapatan TEFA Teknik Elektronika Industri	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Pendapatan TEFA Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Pendapatan TEFA Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**0,00**	Rp**0,00**

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2025 sebesar Rp**2,232,181,000.00** lebih rendah dari pendapatan BLUD dari Hibah LO dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Hibah SPP	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00
Hibah Kementerian	Rp**2,232,181,000.00**	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00
Total Pendapatan BLUD dari Hibah LO	Rp**2,232,181,000.00**	**Rp 0,00**	**0,00**	**Rp 0,00**

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO Tahun 2025 sebesar **Rp80.000.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Pendapatan 2025 (Rp)	Realisasi Pendapatan 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Kerjasama Kantin	Rp80.000.000,00	Rp0,00	100,00	Rp0,00
Kerjasama Penyewaan Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO	**Rp80.000.000,00**	**Rp0,00**	**100,00**	**Rp0,00**

iv) Pendapatan BLUD dari APBD LO

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD LO Tahun 2025 sebesar Rp3,643,690,000.00lebih rendah dari pendapatan BLUD dari APBD LO dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Pendapatan 2025 (Rp)	Realisasi Pendapatan 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Dana BOSP	Rp3,643,690,000.00	Rp0,00	100	Rp0,00
Dana BOSDA	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Total Pendapatan BLUD dari APBD LO	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**0,00**	**Rp0,00**

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2025 sebesar Rp 385,194.00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Pendapatan 2025 (Rp)	Realisasi Pendapatan 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Jasa Giro/ Sewa Kantin	Rp385,194.00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Sewa Gedung/Aula/Lab	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan	**Rp385.194,00**	**Rp0,00**	**0,00**	**Rp0,00**

Uraian	Realisasi Pendapatan 2025 (Rp)	Realisasi Pendapatan 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
BLUD yang Sah LO				

b) Beban dari kegiatan operasional

1. Belanja Pegawai BLUD LO

Berupa Beban Gaji & Tunjangan dan Beban Tambahan Penghasilan BLUD LO dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar **Rp0,00** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Gaji dan Tunjangan	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Beban Tambahan Penghasilan	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Total Beban Pegawai BLUD	Rp**0,00**	Rp**0,00**	**0,00**	Rp**0,00**

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Beban barang dan jasa LO tahun 2025 terealisasi sebesar **Rp.4,055,212,426.27**dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan
Beban Barang dan Ekstrakom	Rp1,637,580,057.00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Beban Jasa	Rp761,488,970,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Beban Perjalanan Dinas	Rp, 226,357,777.00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Beban Pemeliharaan	Rp.48,717,812.00	Rp0,00		
Beban Penyusutan	Rp.1,372,017,810.27			
Total Beban Barang dan Jasa BLUD	**Rp4,055,212,426.27**	**Rp0,00**	**0,00**	**Rp0,00**

c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan dikelompokkan dalam kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional BLUD SMK Negeri 3 Batam tahun 2025 sebesar Rp0,00.

d) Surplus/defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan beban. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 3 Batam mencatat Defisit LO sebesar **Rp 1,901,043,767.73**

5.5 Laporan Arus Kas

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi BLUD SMK Negeri 3 Batam dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi BLUD SMK Negeri 3 Batam pada Tahun 2025 diperoleh Pendapatan BLUD dari jasa layanan, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan Jasa Giro dari Pihak BANK dengan Total sebesar **Rp.3,724,075,194.00** yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	Rp0,00	Rp0,00
Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat	Rp,0.00	Rp0,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	Rp80.000.000,00	Rp0,00
Pendapatan BLUD dari APBN/APBD	Rp3,643,690,000.00	Rp0,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	Rp385,194.00	Rp0,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	**Rp3,724,075,194.00**	**Rp0,00**

b. Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi BLUD SMK Negeri 3 Batam selama Tahun 2025 sebesar **Rp 2,211,539,616.00**dengan Rincian Sebagai Berikut :

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Belanja Pegawai	Rp0,00	Rp0,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp1,944,960,027.00	Rp0,00
Belanja Pemeliharaan	Rp 48,717,812.00	Rp0,00
Belanja PerjalananDinas	Rp 217,861,777.00	Rp0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	**Rp 2,211,539,616.00**	**Rp0,00**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp 1,512,535,578.00 Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**Rp 1,512,535,578.00**	**Rp0,00**

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset Non-Keuangan lainnya.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan di masa yang akan datang.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 3 Batam pada Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan Aset Tetap Tanah	Rp0,00	Rp0,00
Penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp0,00	Rp0,00
Penjualan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp0,00	Rp0,00

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		
Penjualan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp0,00	Rp0,00
Penjualan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	**Rp0,00**	**Rp0,00**

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 3 Batam pada Tahun 2025 sebesar **Rp.1,491,380,384.00** dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Belanja Modal Tanah	Rp0,00	Rp0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 1,069,081,384.00	Rp0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 0.00	Rp0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp0,00	Rp0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 422,299,000.00	Rp0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	**Rp 1,491,380,384.00**	**Rp0,00**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah **Rp (-1,491,380,384.00)** Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**Rp (-1,491,380,384.00)**	**Rp0,00**

3) Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Periode 2025

Kenaikan/(penurunan) Kas Bersih Selama Periode Tahun 2025 merupakan akumulasi jumlah kenaikan/(penurunan) kas bersih dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris.

Selama Tahun Anggaran 2025 terjadi kenaikan/penurunan kas bersih sebesar **Rp 21,275,194.00** yang terdiri dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp **1,512,535,578.00,** Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp **(-1,491,380,384.00)** dan Arus kas bersih dari arus kas dari aktivitas transitoris sebesar **Rp.120.000,00** Perbandingan Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	**Rp 21,275,194.00**	**Rp0,00**

4) Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025

Saldo akhir kas per 31 Desember 2025 merupakan perhitungan Saldo Awal per 1 Januari 2025 ditambah (dikurangi) dengan kenaikan/ (penurunan) kas bersih selama periode tahun 2025.

Saldo akhir kas di BLUD SMK Negeri 3 Batam per 31 Desember 2025 sebesar **Rp 21,275,194.00**, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas di BLUD	**Rp 21,155,194.00**	Rp0,00
Kas Dana BOS	Rp0,00	Rp0,00
Kas Lainnya	**Rp120,000**	Rp0,00
Saldo Akhir Kas	**Rp 21,275,194.00**	**Rp0,00**

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

a) Ekuitas awal
b) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti:
   1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
   2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas Akhir

a) Ekuitas Awal

Pada Tahun 2025 BLUD SMK Negeri 3 Batam mencatat ekuitas awal sebesar Rp 0,00 yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada laporan Tahun 2025. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jumlah Aset Tahun 2025 Rp**27,159,089,235.41**
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025 Rp120.000,00
- **Saldo Awal Ekuitas 2025** **Rp0,00**

b) Surplus/Defisit LO

- Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dalam Laporan Operasional Tahun 2025 tercatat sebesar Rp **1,901,043,767.73**

c) Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar **Rp.27,158,969,235.41** merupakan saldo kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Total Aset dan Total Kewajiban BLUD SMK Negeri 3 Batam Tahun 2025.

- Jumlah Aset Tahun 2025	**Rp27,159,089,235.41**
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025	Rp120.000,00
- **Saldo Awal Ekuitas 2025**	**Rp0,00**

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

BLUD SMK Negeri 3 Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur No. 1407 Tahun 2024.

BLUD SMK Negeri 3 Batam beralamat di JL.Letjen S.Parman Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam.

6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

BLUD SMK Negeri 3 Batam adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nirlaba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra BLUD SMK Negeri 3 Batam , sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala BLUD SMK Negeri 3 Batam

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 3 Batam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun sebagai bentuk tanggung jawab BLUD SMK Negeri 3 Batam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, penyusunan laporan keuangan BLUD juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Secara umum pencapaian kinerja atas sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik, namun begitu masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang masih harus terus dibenahi dan menjadi perhatian oleh BLUD SMK Negeri 3 Batam.

Dengan memperhatikan strategisnya peran sekolah dan besarnya tantangan yang dihadapi untuk mendukung Visi Misi Pendidikan Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, SMK Negeri 3 Batam Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja serta memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan industri. Melalui pendekatan berbasis kompetensi, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta pengelolaan keuangan yang transparan melalui sistem BLUD, sekolah ini berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan lulusan SMK dapat menjadi tenaga kerja yang unggul dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Akhir kata, BLUD SMK Negeri 3 Batam Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan dalam penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban kami dalam menyajikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

Tanjungpinang, 25 Mei 2026
PIMPINAN BLUD SMK N 3 BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Agus Sahrir, M.Pd
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP.196908141999031008

LAPORAN
KEUANGAN
SMK NEGERI 4 BATAM
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
AUDITED



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **I**
DAFTAR TABEL ..... **III**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **V**
KATA PENGANTAR ..... **VI**
PERNAYATAAN PERTANGGUNGJAWAB ..... **VII**
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN ..... **VIII**
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH ..... **X**
C. NERACA ..... **XI**
D. LAPORAN OPERASIONAL ..... **XIII**
E. LAPORAN ARUS KAS ..... **XIV**
F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ..... **XVI**
G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN **1**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 2
1.3 Penangungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 4 Batam 3
1.4 Priode Pelaporan Keuangan 3
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan. 3
BAB II PROFIL SMK NEGERI 4 BATAM **5**
2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 4 Batam 5
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 4 Batam 6
2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Neferi 4 Batam 6
BAB III INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET **7**
3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025 7
3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi 9
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI **11**
4.1 Entitas Akuntansi 11
4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan 11
4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 11
4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 11
4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan 12
4.6 Kebijakan Akuntasni Belanja 12

4.7 Kebijakan Akuntansi Kas 13
4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan 13
4.9 Kebijakan Akuntansi Aset 13
4.10 Kebijakam Akuntansi Kewajiban 14
BAB V RINCIAN POS POS LAPORAN KEUANGAN 15
5.1 Penjelasan Pos pos Laporan Realisasi Anggaran 15
5.2 Penjelasan Pos pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 20
5.3 Neraca 20
5.4 Laporan Operasional 25
5.5 Laporan Arus Kas 29
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas 33
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN 35
6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi 35
6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas 35
BAB VII PENUTUP 36
LAMPIRAN .....

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Anggaran dan Realisasi Program/Keahlian.....6
Tabel. 2 Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target BLUD SMK Negeri 4 Batam Tahun 2025 7
Tabel. 3 Laporan Realisasi Anggaran BLUD SMK Negeri 4 Batam Tahun 2025 15
Tabel. 4 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan SMK Negeri 4 Batam Tahun 2025.....16
Tabel. 5 Pendapatan BLUD dari Hibah 17
Tabel. 6 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama.....17
Tabel. 7 Pendapatan BLUD dari APBD.....17
Tabel. 8 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 18
Tabel. 9 Belanja Pegawai BLUD.....18
Tabel. 10 Belanja Barang dan Jasa BLUD.....19
Tabel. 11 Belanja Modal BLUD 19
Tabel. 12 KAS Bendahara BLUD.....20
Tabel. 13 KAS Bendahara BOS.....21
Tabel. 14 Persediaan BLUD.....21
Tabel. 15 Aset Peralatan dan Mesin BLUD.....22
Tabel. 16 Aset Gedung dan Bangunan BLUD.....22
Tabel. 17 Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD.....23
Tabel. 18 Aset Tetap Lainnya BLUD 24
Tabel. 19 Aset Lainnya BLUD 24
Tabel. 20 Laporan Ekuitas BLUD.....25
Tabel. 21 Pendapatan Laporan Operasional BLUD.....25
Tabel. 22 Pendapatan Hibah Laporan Operasional BLUD.....26
Tabel. 23 Pendapatan Hasil Kerjasama Laporan Operasional BLUD 27
Tabel. 24 Pendapatan BLUD dari APBD LO 27
Tabel. 25 Pendapatan BLUD lain - lain dari LO.....27
Tabel. 26 Belanja Pegawai BLUD dari LO.....28
Tabel. 27 Belanja Barang dan Jasa BLUD dari LO 28
Tabel. 28 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi.....30
Tabel. 29 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi.....30
Tabel. 30 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 31
Tabel. 31 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi.....31

Tabel. 32 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi.....32
Tabel. 33 Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi.....32
Tabel. 34 Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Periode 2025.....32
Tabel. 35 Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025.....33

DAFTAR LAMPIRAN

Rekening Koran .....

LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH .....

NERACA .....

LAPORAN OPERASIONAL .....

LAPORAN ARUS KAS .....

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. BLUD SMK Negeri 4 Batam adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 4 Batam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kami berharap dengan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) di Provinsi Kepulauan Riau.

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan BLUD SMK Negeri 4 Batam
Provinsi Kepulauan Riau



AHMAD TAHIR, S.Pd.,M.Ak
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP 197504222005021003

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan SMK Negeri 4 Batam Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (iii) Neraca; (iv) Laporan Operasional (LO); (v) Laporan Arus Kas (LAK); (vi) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (vii) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Batam, 25 Mei 2026

Pimpinan BLUD SMK Negeri 4 Batam

Provinsi Kepulauan Riau,

AHMAD TAHIR, S.Pd.,M.Ak

Pembina Tingkat I/ IV.b

NIP 197504222005021003

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SMK NEGERI 4 BATAM

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN**	**57,750,000.00**	**3,653,369,738.60**	**6,326.16**	**0.00**
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	43,750,000.00	32,019,415.60	73.19	0.00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0.00	0.00		0.00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	0.00	88,880,000.00	0.00	0.00
6	Pendapatan Hibah	0.00	0.00		0.00
7	Pendapatan APBN/APBD	0.00	3,552,150,000.00	0.00	0.00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	14,000,000.00	320,323.00	2.29	0.00
	Jumlah PENDAPATAN	**57,750,000.00**	**3,653,369,738.60**	**6,326.16**	**0.00**
9	**BELANJA**				
10	**BELANJA OPERASI**	**53,678,300.00**	**2,075,461,400.60**	**3,866.46**	**0.00**
11	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00
12	Belanja Barang dan Jasa	53,678,300.00	2,075,461,400.60	3,866.46	0.00
13	Bunga	0.00	0.00		0.00
14	Belanja Lain-lain	0.00	0.00		0.00
15	**BELANJA MODAL**	**4,071,700.00**	**1,506,934,000.00**	**37,005.5**	**0.00**
16	**Belanja Tanah**	0.00	0.00		0.00
17	**Belanja Peralatan dan Mesin**	4,071,700.00	1,141,694,000.00	28,039.7	0.00
18	Belanja Gedung dan Bangunan	0.00	0.00		0.00
19	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00		0.00
20	Belanja Aset Tetap Lainnya	0.00	365,240,000.00	0.00	0.00
21	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00		0.00
	Jumlah BELANJA	**57,750,000.00**	**3,582,395,400.60**	**6,203.26**	**0.00**
	Surplus/ Defisit Sebelum Pembiayaan	**0.00**	**70,974,338.00**	**0.00**	**0.00**
22	**PENERIMAAN**				
23	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
24	Penggunaan SILPA	0.00	0.00		0.00
25	Penerimaan dari Divestasi	0.00	0.00		0.00
26	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0.00	0.00		0.00
	Jumlah PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**0.00**	**0.00**		**0.00**
27	**PENGELUARAN**				
28	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
29	Pembayaran Pokok Pinjaman	0.00	0.00		0.00
30	Pengeluaran Penyertaan Modal	0.00	0.00		0.00
31	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0.00	0.00		0.00
	Jumlah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**0.00**	**0.00**		**0.00**
	Pembiayaan Neto	**0.00**	**0.00**		**0.00**

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
	Surplus/ Defisit	0.00	70,974,338.00	0.00	0.00

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan BLUD SMK Negeri 4 Batam
Provinsi Kepulauan Riau,

AHMAD TAHIR, S.Pd.,M.Ak
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP 197504222005021003

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SMK NEGERI 4 BATAM

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2.1	0.00	0.00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.2.2	0.00	0.00
3	Subtotal (1-2)		0.00	0.00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	7.5.2.3	70,974,338.00	0.00
5	Subtotal (3+4)		70,974,338.00	0.00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0.00	0.00
7	Lain-lain		0.00	0.00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	7.5.2.6	70,974,338.00	0.00

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan BLUD SMK Negeri 4 Batam
Provinsi Kepulauan Riau,

AHMAD TAHIR, S.Pd.,M.Ak
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP 197504222005021003

C. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SMK NEGERI 4 BATAM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	**ASET**	**1.1.**	**24,109,211,045.04**	**0.00**
2	**ASET LANCAR**	**1.1.1.**	**70,074,338.00**	**0.00**
3	Kas di Bendahara Penerimaan	1.1.1.00.	0.00	0.00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.1.1.01.	0.00	0.00
5	Kas di BLUD	1.1.1.02.	70,074,338.00	0.00
6	Kas Dana BOS	1.1.1.03.	0.00	0.00
7	Kas Dana PJSP	1.1.1.04.	0.00	0.00
8	Kas Lainnya Setara Kas	1.1.1.05.	0.00	0.00
9	Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum	1.1.1.06.	0.00	0.00
10	Piutang Pajak	1.1.1.07.	0.00	0.00
11	Piutang Reinbusi	1.1.1.08.	0.00	0.00
12	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.09.	0.00	0.00
13	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.09.	0.00	0.00
14	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.1.10.	0.00	0.00
15	Belanja dibayar dimuka	1.1.1.11.	0.00	0.00
16	Piutang Lainnya	1.1.1.12.	0.00	0.00
17	Persediaan Badan Layanan Umum	1.1.1.13.	0.00	0.00
18	Aset Untuk Dikonsolidasikan	1.1.1.14.	0.00	0.00
	Jumlah ASET LANCAR		70,074,338.00	0.00
19	**ASET TETAP**	**1.1.2.**	**24,109,786,708.04**	**0.00**
20	Tanah	1.1.2.01.	5,286,015,400.00	0.00
21	Peralatan dan Mesin	1.1.2.02.	7,122,007,259.00	0.00
22	Gedung dan Bangunan	1.1.2.03.	16,303,799,298.00	0.00
23	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.1.2.04.	0.00	0.00
24	Aset Tetap Lainnya	1.1.2.05.	2,675,512,880.00	0.00
25	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.1.2.06.	0.00	0.00
26	Akumulasi Penyusutan	1.1.2.07.	(1,277,287,828.96)	0.00
	Jumlah ASET TETAP		24,109,786,708.04	0.00
27	**PIUTANG JANGKA PANJANG**	**1.1.3.**	**0.00**	**0.00**
28	Tagihan Penjualan Angsuran	1.1.3.01.	0.00	0.00
29	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	1.1.3.02.	0.00	0.00
30	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.3.03.	0.00	0.00
	Jumlah PIUTANG JANGKA PANJANG		0.00	0.00
31	**ASET LAINNYA**	**1.1.4.**	**8,000,000.00**	**0.00**
32	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.1.4.01.	0.00	0.00
33	Dana Kelolaan	1.1.4.02.	0.00	0.00
34	Aset yang dibatasi Penggunaannya	1.1.4.03.	0.00	0.00

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
35	Aset Tak Berwujud	1.1.4.04	0.00	0.00
36	Aset Lain - Lain	1.1.4.05	8,660,000.00	0.00
37	Akumulasi Amortisasi	1.1.4.06	0.00	0.00
	Jumlah ASET LAINNYA		8,660,000.00	0.00
	JUMLAH ASET		24,189,311,046.04	0.00
38	KEWAJIBAN	1.2.	0.00	0.00
39	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.2.1.	0.00	0.00
40	Utang Usaha	1.2.1.01	0.00	0.00
41	Utang Pihak Ketiga	1.2.1.02	0.00	0.00
42	Utang Pajak	1.2.1.03	0.00	0.00
43	Utang Kepada KUN	1.2.1.04	0.00	0.00
44	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.2.1.05	0.00	0.00
45	Belanja yang masih harus dibayar	1.2.1.06	0.00	0.00
46	Pendapatan Diterima Dimuka	1.2.1.07	0.00	0.00
47	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.2.1.08	0.00	0.00
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0.00	0.00
48	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	1.2.2.	0.00	0.00
49	Utang Jangka Panjang	1.2.2.01	0.00	0.00
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0.00	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN		0.00	0.00
50	EKUITAS	1.3.	24,189,311,046.04	0.00
51	EKUITAS	1.3.1.	24,189,311,046.04	0.00
52	Ekuitas	1.3.1.01	24,189,311,046.04	0.00
	Jumlah EKUITAS		24,189,311,046.04	0.00
	JUMLAH EKUITAS		24,189,311,046.04	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		24,189,311,046.04	0.00

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan BLUD SMK Negeri 4 Batam
Provinsi Kepulauan Riau,

AHMAD TAHIR, S.Pd.,M.Ak
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP 197504222005021003

D. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BLUD SMK NEGERI 4 BATAM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	32,010,415.00	0.00	32,010,415.00	100.00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0.00	0.00	0.00	
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama	68,880,000.00	0.00	68,880,000.00	100.00
5	Pendapatan Hibah	1,899,687,000.00	0.00	1,899,687,000.00	100.00
6	Pendapatan Usaha Lainnya	320,323.00	0.00	320,323.00	100.00
7	Pendapatan APBN/ APBD	3,552,150,000.00	0.00	3,552,150,000.00	100.00
	Jumlah PENDAPATAN	5,553,056,738.00	0.00	5,553,056,738.00	100.00
8	BEBAN				
9	Beban Pegawai	0.00	0.00	0.00	
10	Beban Persediaan	1,424,946,850.00	0.00	1,424,946,850.00	100.00
11	Beban Jasa	375,886,992.00	0.00	375,886,992.00	100.00
12	Beban Pemeliharaan	299,159,000.00	0.00	299,159,000.00	100.00
13	Beban Langganan Daya dan Jasa	328,583,324.00	0.00	328,583,324.00	100.00
14	Beban Perjalanan Dinas	129,681,234.00	0.00	129,681,234.00	100.00
15	Beban Penyusutan Aset	1,277,207,928.96	0.00	1,277,207,928.96	100.00
16	Beban Bunga	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah BEBAN	3,775,363,328.96	0.00	3,775,363,328.96	100.00
	Surplus/Defisit Operasional	1,777,693,409.04	0.00	1,777,693,409.04	100.00
17	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
18	Surplus/ Defisit Penjualan Aset Nonlancar	0.00	0.00	0.00	
19	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	0.00	0.00	0.00	
20	Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah Surplus/Defisit Dari KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.00	0.00	0.00	
	Surplus/Defisit Sebelum POS LUAR BIASA	1,777,693,409.04	0.00	1,777,693,409.04	100.00
21	POS LUAR BIASA				
22	Pendapatan Luar Biasa	0.00	0.00	0.00	
23	Beban Luar Biasa	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah POS LUAR BIASA	0.00	0.00	0.00	
	Surplus/Defisit-LO	1,777,693,409.04	0.00	1,777,693,409.04	100.00

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan BLUD SMK Negeri 4 Batam
Provinsi Kepulauan Riau,

AHMAD TAHIR, S.Pd.,M.Ak
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP 197504222005021003

E. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BLUD SMK NEGERI 4 BATAM
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	**Arus Masuk Kas**		
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	32,019,415.00	0.00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0.00	0.00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	68,880,000.00	0.00
6	Pendapatan Hibah	0.00	0.00
7	Pendapatan APBN/APBD	3,552,150,000.00	0.00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	320,323.00	0.00
	Jumlah Arus Masuk Kas	3,653,369,738.00	0.00
9	**Arus Keluar Kas**		
10	Pembayaran Pegawai	0.00	0.00
11	Pembayaran Barang dan Jasa	1,378,138,842.00	0.00
12	Pembayaran Pemeliharaan	239,158,000.00	0.00
13	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	328,583,324.00	0.00
14	Pembayaran Perjalanan Dinas	129,581,234.00	0.00
15	Pembayaran Bunga	0.00	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas	2,075,461,400.00	0.00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi	1,577,908,338.00	0.00
16	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
17	**Arus Masuk Kas**		
18	Penjualan atas Tanah	0.00	0.00
19	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0.00	0.00
20	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0.00	0.00
21	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00
22	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00
23	Penjualan Aset Lainnya	0.00	0.00
24	Penerimaan dari Divestasi	0.00	0.00
25	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0.00	0.00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0.00	0.00
26	**Arus Keluar Kas**		
27	Perolehan Tanah	0.00	0.00
28	Perolehan Peralatan dan Mesin	1,141,694,000.00	0.00

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
29	Perolehan Gedung dan Bangunan	0.00	0.00
30	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00
31	Perolehan Aset Tetap Lainnya	365,240,000.00	0.00
32	Perolehan Aset Lainnya	0.00	0.00
33	Pengeluaran Penyertaan Modal	0.00	0.00
34	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0.00	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas	1,506,934,000.00	0.00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(1,506,934,000.00)	0.00
35	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**		
36	**Arus Masuk Kas**		
37	Penerimaan Pinjaman	0.00	0.00
38	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0.00	0.00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0.00	0.00
39	**Arus Keluar Kas**		
40	Pembayaran Pokok Pinjaman	0.00	0.00
41	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0.00	0.00
42	Penyetoran ke Kas Negara	0.00	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0.00	0.00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0.00	0.00
43	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**		
44	**Arus Masuk Kas**		
45	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0.00	0.00
46	**Arus Keluar Kas**		
47	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0.00	0.00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0.00	0.00
48	**Kenaikan/ Penurunan Kas BLU**	70,974,338.00	0.00
49	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLU**	0.00	0.00
50	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU**	70,974,338.00	0.00

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan BLUD SMK Negeri 4 Batam
Provinsi Kepulauan Riau,

AHMAD FAHIR, S.Pd.,M.Ak
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP 197504222005021003

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BLUD SMK Negeri 4 Batam

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Ekuitas Awal		0.00	0.00
2	Surplus/Defisit-LO		1,777,693,409.04	0.00
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		0.00	0.00
4	Koreksi Nilai Persediaan		0.00	0.00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		0.00	0.00
6	Lain-lain		0.00	0.00
7	Ekuitas Akhir		**1,777,693,409.04**	**0.00**

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan BLUD SMK Negeri 4 Batam
Provinsi Kepulauan Riau,

AHMAD TAFUR, S.Pd.,M.Ak
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP 197504222005021003

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan disusun berdasarkan data transaksi dan dokumen pendukung yang dimiliki perusahaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Laporan keuangan ini disajikan dalam mata uang Rupiah (Rp).

Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan menggunakan metode biaya historis dan dasar akrual, kecuali dinyatakan lain.

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan Keuangan BLUD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran ;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan BLUD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala BLUD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan,

serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan BLUD

menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SMK Negeri 4 Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan RiauTahun 2024.
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gurbernur nomor 75 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

18. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 4 Batam Tahun 2025, adalah tanggungjawab sepenuhnya BLUD SMK Negeri 4 Batam, dalam hal ini adalah Pimpinan BLUD SMK Negeri 4 Batam.

1.4 Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 4 Batam tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2025, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 4 Batam tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (*Subsequent Event*) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 4 Batam tahun 2025. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2025.

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 4 Batam adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 4 Batam
- 1.4 Periode Pelaporan Keuangan
- 1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Profil BLUD SMK Negeri 4 Batam
- 1.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 4 Batam
- 1.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 4 Batam
- 1.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 4 Batam tahun 2025

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Asumsi dasar Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- 4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja
- 4.7 Kebijakan Akuntansi Kas
- 4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan
- 4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- 4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
5.1 Laporan Realisasi Anggaran
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3 Neraca
5.4 Laporan Operasional
5.5 Laporan Arus Kas
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
5.7 Catatan Atas Laporan Keuangan
Bab VI Penjelasan atas informasi – Informasi non Keuangan
6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan
Bab VII Penutup

BAB II

PROFL BLUD SMKN NEGERI 4 BATAM

2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 4 Batam

BLUD SMK Negeri 4 Batam memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten serta tenaga ahli yang mendukung pelaksanaan *Teaching Factory (TEFA)*. SDM yang tersedia meliputi:

1. Tenaga Pendidik (Guru Produktif dan Normatif):
   - Guru bersertifikasi keahlian industri sesuai bidang kompetensi.
   - Guru mata pelajaran umum yang mendukung kurikulum berbasis kompetensi.
   - Instruktur dari dunia industri yang terlibat dalam program pelatihan siswa.
2. Tenaga Kependidikan:
   - Staf administrasi yang mengelola keuangan dan operasional BLUD.
   - Teknisi laboratorium dan Workshop untuk mendukung kegiatan praktik.
   - Tenaga keamanan dan kebersihan untuk menjaga lingkungan sekolah yang kondusif.
3. Kemitraan dengan Industri:
   - Mengundang praktisi industri sebagai instruktur tamu.
   - Menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk program magang dan penyerapan tenaga kerja.
   - Mengembangkan skema sertifikasi kompetensi yang diakui dunia usaha dan industri.

Sebagai SMK BLUD yang berbasis *Teaching Factory* (TEFA), sekolah telah memiliki berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran berbasis produksi dan layanan industri, di antaranya:

1. Ruang Kelas dan Laboratorium:
   - Ruang kelas berbasis IT untuk pembelajaran teori.
   - Laboratorium komputer untuk pembelajaran informatika.
   - Perpustakaan sebagai pusat referensi dan literasi siswa.
2. Workshop dan Lab TEFA:
   - Workshop Desain Komunikasi Visual untuk kegiatan Advertising dan Studio.
   - Workshop RPL Edutech Solution untuk kegiatan Maintenance dan Perbaikan Komputer.
   - Workshop Produksi Jahe Instan untuk Kegiatan Produksi Minuman Kesehatan.
   - Skill Mart (Mini Market) untuk kegiatan Tefa Teknik Logistik dalam Bidang Retail.
3. Fasilitas Pendukung:
   - Ruang Praktik SMK Negeri 4 Batam.
   - Alat Praktik SMK Negeri 4 Batam
   - Ruang pemasaran produk hasil Teaching Factory.
   - Area publik seperti kantin sekolah yang dikelola bersama dengan pihak Ketiga sebagai bentuk Kerjasama.

Sebagai BLUD, SMK memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan Teaching Factory. Sumber dana sekolah berasal dari:

1. Dana BOS dan APBD:
   - Digunakan untuk operasional sekolah, gaji guru, serta pengadaan bahan ajar dan alat praktik.
2. Pendapatan dari Unit Usaha TEFA:
   - Hasil penjualan produk dari unit Teaching Factory.
   - Jasa layanan seperti Skill Mart, Desain Komunikasi Visual 04 Advertising (DKV 04 Advertising), Desain Komunikasi Visual 04 Studio (DKV04 Studio), Rekayasa Perangkat Lunak Edutech Solusion (RPL).
   - Kerjasama dengan pihak lain berupa penyewaan Kantin dan Penyewaan Lab Komputer.
3. Bantuan dari Pemerintah dan Swasta:
   - Hibah atau bantuan dari pemerintah untuk pengembangan kurikulum dan fasilitas.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 4 Batam

Strategi dan arah kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada SMK Negeri 4 Batam disusun sebagai pedoman dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, efisiensi pengelolaan keuangan, serta penguatan unit produksi dan jasa sekolah. Penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD diharapkan mampu meningkatkan fleksibilitas pengelolaan sumber daya sekolah sehingga layanan pendidikan dapat berjalan secara optimal, profesional, dan berorientasi pada mutu.

2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 4 Batam

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Program/Keahlian

No	Unit Teaching Factory (TEFA)	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Keterangan
1	**TEFA SKILL MART**	Jasa Retail Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	Penutupan TEFA pada Desember 2025.
2	**TEFA DKV04 Advertising**	Percetakan	9.087.500	2.100.400	23,11%	Belanja Alat dan Bahan pada beberapa toko tidak tersedia.
3	**TEFA DKV04 Studio**	Jasa Studio	0,00	0,00	0,00	Ada beberapa Alat substitusi yang dapat dimaksimalkan
4	**TEFA RPL EDUTECH SOLUSION**	Jasa Maintenance Komputer	2.171.500	2.171.500	100%	Belanja Alat dan Bahan TEFA sudah terpenuhi.
5	**TEFA Jahe Instan 04**	Produksi Minuman Kesehatan	192.000	192.000	100%	Belanja Alat dan Bahan TEFA sudah terpenuhi.

TABEL. 1 Anggaran dan Realisasi Program 1

BAB III

INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja pada BLUD SMK, pada laporan keuangan ini digunakan sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat managemen yang digunakan untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran dan tujuan, untuk mewujudkan misi dan visi organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut akan disajikan data kinerja BLUD SMK Negeri 4 Batam Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target BLUD SMK Negeri 4 Batam Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target Rata - rata Nilai	Realisasi Rata – rata Nilai	Capaian (%)	Keterangan
A. Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa					
1	Persentase kelulusan siswa	574	573	99,8%	1% siswa tidak lulus karena Siswi tersebut mengalami sakit Kanker Otak.
2	Rata-rata nilai Ujian Kompetensi Keahlian (UKK)	≥ 80	85	106%	Mencapai target
3	Persentase siswa yang memperoleh sertifikasi kompetensi industri	0,00	0,00	0,00	Beberapa siswa belum lulus uji sertifikasi
4	Persentase lulusan yang bekerja sesuai kompetensi dalam 6 bulan	50%	50,13%	100,26 %	Melebihi target, keterserapan lulusan di dunia kerja berjalan baik
5	Persentase lulusan yang berwirausaha	10%	10,5%	105%	Melebihi target, program wirausaha berjalan baik
B. Kinerja Keuangan dan Unit Usaha BLUD					
6	Persentase pendapatan unit usaha BLUD terhadap biaya operasional sekolah	0,00	0,00	0,00	Tidak ada Pendapatan BLUD dari jasa layanan untuk Operasional Sekolah

No	Indikator Kinerja	Target Rata - rata Nilai	Realisasi Rata – rata Nilai	Capai an (%)	Keterangan
7	Efisiensi penggunaan dana BLUD sesuai rencana kerja	90%	96,99%	108%	Anggaran terserap dengan baik dan efektif
C. Kinerja Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)					
8	Jumlah kerja sama aktif dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	0,00	0,00	0,00	TEFA di SMKN 4 Batam belum ada Kerjasama dengan DU/DI
9	Persentase siswa yang menjalani magang industri	100%	100%	100%	Semua siswa telah menjalani magang
10	Jumlah produk atau jasa unggulan dari Teaching Factory (TEFA)	5 produk	4 produk	80%	Ada satu TEFA yang belum mempunyai modal untuk Produksi.
D. Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan					
11	Kepuasan siswa dan orang tua terhadap layanan pendidikan	85%	85%	100%	Tercapai
12	Jumlah guru produktif bersertifikasi industri	75%	70%	93%	Hampir mencapai target, ada guru dalam proses sertifikasi

Tabel .2 Indikator Kinerja dan Realisasi 1

Berdasarkan tabel pencapaian, secara keseluruhan SMK BLUD telah mencapai rata-rata 98% dari target yang ditetapkan. Beberapa indikator bahkan melebihi target, seperti wirausaha lulusan, jumlah mitra industri, dan kepuasan siswa. Namun, ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, seperti pencapaian pendapat usaha BLUD dan jumlah guru bersertifikasi industri. Untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menjaga dan meningkatkan kemitraan dengan industri untuk meningkatkan jumlah lulusan yang bekerja sesuai kompetensi.
2. Optimalisasi pemasaran unit usaha BLUD untuk meningkatkan pendapatan sekolah.
3. Pengembangan produk Teaching Factory agar lebih kompetitif di pasar.
4. Memotivasi guru produktif untuk dapat menyelesaikan program sertifikasinya.

Dengan perbaikan strategi ini, diharapkan SMK BLUD dapat mencapai 100% target di tahun mendatang.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Adapun hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target realisasi antara lain :

a. Hambatan dalam Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa
   1. Kurangnya kesiapan siswa dalam ujian sertifikasi industri
      - Tidak semua siswa memiliki kesiapan yang cukup untuk lulus uji sertifikasi.
      - Waktu Praktek kerja Lapangan (PKL) yang berdekatan dengan uji kompetensi keahlian mengakibatkan banyak siswa yang tidak maksimal dalam mengikutinya.

   2. Tingkat kelulusan yang belum 100%
      - Siswa tidak menyelesaikan PKL sehingga tidak memenuhi syarat untuk kelulusan.
      - Kurangnya motivasi belajar dan disiplin dari siswa tersebut.
   3. Penyerapan lulusan ke dunia kerja belum optimal
      - Persaingan ketat di dunia kerja sehingga tidak semua lulusan langsung terserap.
      - Masih ada lulusan yang lebih memilih bekerja di luar bidang keahlian mereka.

b. Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan dan Unit Usaha BLUD
   1. Pendapatan unit usaha BLUD belum mencapai target
      - Persaingan dengan produk atau jasa dari industri komersial yang lebih mapan.
      - Kurangnya strategi pemasaran dan branding produk/jasa SMK BLUD.
      - Kurangnya konstitensi dari hasil produksi sehingga mengakibatkan ekspansi dari pemasaran produk tidak optimal.
   2. Efisiensi penggunaan dana BLUD
      - Masih ada beberapa program yang belum berjalan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas.
      - Keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah atau sumber pendanaan lain.

c. Hambatan dalam Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)
   1. Jumlah produk unggulan Teaching Factory belum optimal
      - Keterbatasan dalam sumber daya manusia dalam bagian produksi dan quality control (QC) dalam kegiatan produksi hasil TEFA.
      - Produk belum sepenuhnya sesuai standar pasar, sehingga masih butuh perbaikan dalam kualitas dan pemasaran.
   2. Kemitraan industri masih perlu diperluas
      - Kurangnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja.
      - Kurangnya peranan industri dalam hal pendampingan produksi TEFA yang selaras dengan produk industry tersebut.

d. Hambatan dalam Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan
   1. Tingkat kepuasan siswa dan orang tua belum maksimal
      - Beberapa siswa merasa materi pembelajaran masih kurang relevan dengan dunia kerja.
      - Orang tua belum sepenuhnya memahami konsep BLUD di SMK, sehingga kurang mendukung program sekolah.
   2. Kurangnya jumlah guru bersertifikasi industri

- Tidak semua guru memiliki kesempatan mengikuti pelatihan atau sertifikasi karena keterbatasan waktu dan biaya.
- Masih ada kendala administratif dalam proses pengajuan sertifikasi guru ke lembaga industri terkait.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Akuntansi adalah BLUD SMK Negeri 4 Batam Provinsi Kepulauan Riau.

4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas;
b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 4 Batam Provinsi Kepulauan Riau adalah:

a) ***Basis Kas*** untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam ***Laporan Realisasi Anggaran***
Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat Kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

b) ***Basis akrual*** untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam ***Neraca***
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

c) ***Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran*** berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

d) ***Basis akrual untuk neraca*** berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas;

4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengakuan dan pengukuran atas transaksi kejadian ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan ini adalah:

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.
   Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD , adalah sebagai berikut:

   a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
   b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
   c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
   d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

   Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 4 Batam tahun 2025, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat Diterima pada Rekening Kas Umum. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum untuk seluruh transaksi setelah dilakukan pengesahan definitif bendahara. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

4.7 Kebijakan Akuntansi Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas secara umum diakui jika memenuhi kriteria:

a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.

4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari:

- Barang Konsumsi;
- Bahan untuk pemeliharaan;
- Suku cadang;
- Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
- Bahan baku;
- Barang dalam proses/setengah jadi;

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal; diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.

4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila Aset Tetap

berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.

4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

BAB V

RINCIAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang telah disusun BLUD SMK Negeri 4 Batam periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini:

5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan – LRA

Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 4 Batam mencatat Realisasi pendapatan BLUD SMKN 4 Batam sebesar **Rp3,653,369,738.00** atau sebesar **6,326%** dari target Anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp57,750,000.00.**

Tabel 3. Laporan Realisasi Anggaran

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	Rp43,750,000.00	Rp32.019.415,00	73,19	Rp**0.00**
Pendapatan dari Hibah Terikat	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp**0.00**
Pendapatan BLUD dari Hibah Tidak terikat	Rp 0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	Rp0,00	Rp68.880.000,00	0,00	Rp0,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	Rp14,000,000.00	Rp320.323,00	2,29	Rp0,00

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)

Pendapatan BLUD dari APBN/APBD	Rp0.00	Rp3,552,150,000.00	0,00	Rp0,00
TOTAL PENDAPATAN BLUD	**Rp57,750,000.00**	**Rp3,653,369,738.00**	**6,326**	Rp0,00

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Tahun 2025 sebesar Rp **32.019.415,00** atau **130,3%** dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp **43,750,000.00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

Uraian	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%	Realisasi Pendapatan 2025
Pendapatan TEFA Skill Mart	Rp15.000.000	Rp15.024.015	100,16	Rp15.024.015
Pendapatan TEFA DKV Advertising 04	Rp24.000.000,00	Rp15.930.400,00	177,00	Rp15.930.400,00
Pendapatan TEFA DKV STUDIO 04	Rp1.800.000,00	Rp865.000,00	540,00	Rp865.000,00
Pendapatan TEFA RPL Edutech Solution	Rp1.750.000,00	Rp200.000,00	100,00	Rp200.000,00
Pendapatan TEFA Jahe Instan 04	Rp1.200.000,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	**Rp43,750,000.00**	**Rp32.019.415,00**	**73,19 %**	**Rp32.019.415,00**

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah Tahun 2025 sebesar **R0,00** atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan **Rp0,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. Pendapatan BLUD dari Hibah

Uraian	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%	Realisasi Pendapatan 2025
Hibah SPP/ Hibah Tidak Terikat	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Hibah Kementerian/ Hibah Terikat	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Total Pendapatan BLUD dari Hibah	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**0,00**	**Rp0,00**

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Tahun 2025 sebesar **Rp68.880.000,00** atau 105,96% lebih tinggi dari anggaran yang ditargetkan sebesar **Rp0,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama

Uraian	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%	Realisasi Pendapatan 2025
Kerjasama Kantin	Rp0,00	Rp68.880.000,00	0,00	Rp68.880.000,00
Kerjasama Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	**Rp0,00**	**Rp68.880.000,00**	**0,00**	**Rp68.880.000,00**

iv) Pendapatan BLUD dari APBD

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD Tahun 2025 sebesar **Rp3,552,150,000.00** atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar **Rp0.00** dengan kesimpulan tidak ada bantuan dari APBD untuk BLUD pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7. Pendapatan BLUD dari APBD

Uraian	Anggaran Pendapatan(Rp)	Realisasi Pendapatan(Rp)	%	Realisasi Pendapatan 2025
Dana BOSP	Rp0.00	Rp3,552,150,000.00	0,00	Rp3,552,150,000.00
Total Pendapatan BLUD dari APBD	**Rp0.00**	**Rp3,552,150,000.00**	**0,00**	**Rp3,552,150,000.00**

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah (Jasa Giro)

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah (Jasa Giro) Tahun 2025 sebesar **Rp320.323,00** atau 2,29% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp14,000,000.00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8. Pendapatan BLUD dari Jasa Giro

Uraian	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%	Realisasi Pendapatan 2025
Pendapatan BLUD Lain-lain yang Sah (Jasa Giro)	Rp14,000,000.00	Rp320.323,00	2,29	Rp320.323,00
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	**Rp14,000,000.00**	**Rp320.323,00**	**2,29**	**Rp320.323,00**

2. Belanja

1. Belanja Pegawai BLUD

Berupa Belanja Gaji & Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan BLUD dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % dari total anggaran belanja pegawai BLUD yang sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9. Belanja Pegawai BLUD

	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp0,00	Rp0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan	Rp0,00	Rp0,00	0,00
Total Belanja Pegawai BLUD	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**0,00**

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar **Rp2,075,461,400.00** atau **97,23%** dari total anggaran belanja barang dan jasa yang sebesar **Rp53,678,300.00**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 10. Belanja Barang dan Jasa BLUD

	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Barang dan Jasa	Rp53,678,300.00	Rp 2,075,461,400.00	3,866
Belanja Pemeliharaan	Rp0,00	Rp0,00	0,00
Total Belanja Barang dan Jasa BLUD	**Rp53,678,300.00**	**Rp2,075,461,400.00**	3,866

3. Belanja Modal BLUD

Belanja modal BLUD terdiri dari belanja modal Peralatan dan Mesin yang terealisasi sebesar **1,506,934,000.00** atau 28,039% dari total anggaran belanja modal peralatan dan mesin yang sebesar **Rp4,071,700.00**, belanja modal gedung dan bangunan yang terealisasi sebesar **Rp0.00** atau 0,00% dari total anggaran belanja modal gedung dan bangunan yang sebesar **Rp0.00,** Belanja modal Aset Tetap Lainnya Terealisasi sebesar **Rp365,240,000.00** atau **0,00%** dari total Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar **Rp0.00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 11. Belanja Modal BLUD

Uraian	Anggaran Belanja(Rp)	Realisasi Belanja(Rp)	%	Realisasi Belanja 2024
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp4,071,700.00	Rp1,141,694,000.00	29,039	Rp0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0.00	Rp0.00	0,00	Rp0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp0.00	Rp365,240,000.00	0,00	Rp0,00

Total Belanja Modal BLUD	**Rp4,071,700.00**	**Rp1,506,934,000.00**	**37,009**	**Rp0,00**

5.2 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo awal SAL pada tahun 2025 sebesar **Rp70.974.338,00** merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2025.

2) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan digunakan dalam rangka membiayai defisit tahun anggaran berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp70.974.338,00** merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2025.

3) Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SiLPA tahun 2025 sebesar **Rp70.974.338,00**

5.3 Neraca

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- Berupa kas/setara kas dan persediaan

Aset Lancar sebesar **Rp70.974.338,00** yang dimiliki BLUD SMK Negeri 4 Batam per 31 Desember 2025 terdiri dari:

a. Kas di Bendahara BLUD

Kas BLUD adalah semua bentuk penerimaan dan pengeluaran uang tunai atau setara kas yang dikelola oleh SMK Negeri 4 Batam dalam rangka menjalankan operasionalnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, dan pendapatan lainnya. Pada tahun 2025 saldo di KAS Bendahara Penerimaan BLUD dengan total sebesar **Rp62.150,00** karna Bunga Bank pada tahun berjalan, Bunga Bank pada KAS Bendahara Pengeluara BLUD dengan total sebesar **Rp.1.558,00** dan KAS yang ada pada KAS BLUD hasil setoran dari KAS penerimaan dan pengeluaran dengan total Rp. **70.910.630,00,** dengan rincian :

Tabel 12. KAS Bendahara BLUD

Uraian	Jumlah
Kas di Bank	
Rek Bank Penerimaan SMKN 4 Batam Norek 8.240.100.007 (BRK Syariah)	Rp62.150,00

Rek Bank Pengeluaran SMKN 4 BatamNorek 8.240.100.009 (BRK Syariah)	Rp1.558,00
Rek Bank KAS SMKN 4 Batam Norek 8.240.100.008 (BRK Syariah)	Rp70.910.630,00
Kas Tunai	0,00
Total Kas di Bendahara BLUD	Rp**70.974.338,00**

b. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan kas dibawah pengelolaan bendahara BOS yang bersumber dari pemerintah untuk mendukung operasional sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan tanpa membebani peserta didik. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp0,00 dengan rincian :

Tabel 13. KAS Bendahara BOS

Uraian	Jumlah
Kas di Bank	
Rek Bank BOS Norek 1863800020 (BRK Syariah)	Rp0,00
Kas Tunai	Rp0,00
Total Kas di Bendahara BOS	**Rp0,00**

c. Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan kas yang berasal dari sumber-sumber lain. Kas Lainnya pada BLUD SMK Negeri 4 Batam berasal dari pungutan SPP kepada para siswa yang sejak awal Tahun 2025 sudah tidak dipungut lagi. saldo Kas Lainnya pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp0,00.**

d. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar **Rp0,00** terdiri dari :

Tabel 14. Persediaan BLUD

Uraian	Jumlah
Persediaan Barang Habis Pakai	Rp0,00
- Bahan	Rp0,00
- Suku Cadang	Rp0,00
Persediaan BarangTidak Habis Pakai	Rp0,00
Total Persediaan	**Rp0,00**

2. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh pelayanan umum. Aset tetap sebesar **Rp 24,109,786,708.04** per 31 Desember 2025 merupakan nilai perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan

yang pengadaannya bersumber dari pengelolaan dana BOS dan dana SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dan BLUD.

a. Tanah

Nilai aset tanah BLUD SMK Negeri 4 Batam per 31 Desember 2025 sebesar **Rp 5,285,615,400.00** dan tidak terdapat penambahan aset tetap tanah selama tahun 2025 pada BLUD.

b. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin BLUD SMK Negeri 4 Batam per 31 Desember 2025 sebesar **Rp7,122,067,259.00** meningkat sebesar **Rp 7,122,067,259.00** jika dibandingkan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 yang sebesar **Rp0,00**. Pada tahun 2025 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan pada Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 15. Aset Peralatan dan Mesin BLUD

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**Rp 0,00**
Penambahan :	
- Belanja Peralatan dan Mesin	Rp7,122,067,259.00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp 0,00
- Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kementerian	Rp 0,00
Total Penambahan	**Rp7,122,067,259.00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	Rp 0,00
Total Pengurangan :	**Rp 0,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**Rp7,122,067,259.00**

c. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan BLUD SMK Negeri 4 Batam per 31 Desember 2025 sebesar **Rp10,303,799,298.00** tidak ada peningkatan dikarenakan BLUD baru berjalan pada tahun 2025. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Aset Gedung dan Bangunan BLUD

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**Rp 0,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 10,303,799,298.00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0,00

Uraian	Jumlah
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp 0,00
- Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kementerian	Rp 0,00
Total Penambahan	**Rp 10,303,799,298.00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	Rp 0,00
Total Pengurangan :	**Rp 0,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**Rp 10,303,799,298.00**

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD SMK Negeri 4 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 tidak ada peningkatan dari tahun 2024, di karenakan SMKN 4 Batam baru menjalani BLUD pada tahun 2025. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**Rp 0,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 0,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp 0,00
- Hibah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kementerian	Rp 0,00
Total Penambahan	**Rp 0,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	Rp 0,00
Total Pengurangan :	**Rp 0,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**Rp 0,00**

e. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Aset Tetap Lainnya BLUD SMK Negeri 4 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp2,675,512,680.00, tidak terjadinya peningkatan pada tahun 2024 di karenakan SMKN 4 Batam baru menjadi

BLUD pada Januari tahun 2025. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 pada aset tetap lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 18. Aset Tetap Lainnya BLUD

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	**Rp 0,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp2,675,512,680.00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp 0,00
- Hibah Aset Tetap Lainnya dari Kementerian	Rp 0,00
Total Penambahan	**Rp2,675,512,680.00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Lainnya	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	Rp 0,00
Total Pengurangan :	**Rp 0,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya	**Rp2,675,512,680.00**

3. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya dapat berupa Aset Tidak Berwujud dan Aset Rusak Berat/Tidak Digunakan Lagi dalam Operasional Kegiatan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 4 Batam mencatat Aset Lainnya sebesar Rp 8,550,000.00 terdiri dari Aset Tidak Berwujud (Software, dll) sebesar Rp 8,550,000.00 dan Aset Rusak Berat/Tidak Digunakan Lagi dalam Operasional Kegiatan sebesar Rp 0,00. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Aset Lainnya BLUD

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Lainnya	**Rp 0,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Lainnya	Rp8,550,000.00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp 0,00
- Hibah Aset Lainnya dari Kementerian	Rp 0,00
Total Penambahan	**Rp8,550,000.00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Lainnya	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	Rp 0,00
Total Pengurangan :	**Rp 0,00**
Saldo Akhir Aset Lainnya	**Rp8,550,000.00**

4. Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 4 Batam tidak memiliki kewajiban.

5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD SMK Negeri 4 Batam pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pada Tahun 2025 Ekuitas adalah sebesar **Rp1,777,693,409.04**

Tabel 20. Laporan Ekuitas BLUD

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Ekuitas	**Rp 0,00**
- Surplus/Defisit LO	**(Rp 1,777,693,409.04)**
- Koreksi Ekuitas	Rp 0,00
Saldo Ekuitas Akhir	**Rp 1,777,693,409.04**

5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional
b) Beban dari kegiatan operasional
c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
d) Pos luar biasa
e) Surplus/defisit LO

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional

Pendapatan LO dari kegiatan operasional terdiri dari :

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2025 sebesar **Rp 32.019.415,00** lebih tinggi dari Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 21. Pendapatan Laporan Operasional BLUD

Uraian	Realisasi Pendapatan 2025 (Rp)	Realisasi Pendapatan 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan TEFA Skill Mart	Rp15.024.015,00	Rp0,00	100,00	Rp15.024.015,00

Uraian	Realisasi Pendapatan 2025 (Rp)	Realisasi Pendapatan 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan TEFA DKV Advertising 04	Rp15.930.400,00	Rp0,00	100,00	Rp15.930.400,00
Pendapatan TEFA DKV STUDIO 04	Rp865.000,00	Rp0,00	100,00	Rp865.000,00
Pendapatan TEFA RPL Edutech Solution	Rp200.000,00	Rp0,00	0,00	Rp200.000,00
Pendapatan TEFA Jahe Instan 04	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO	**Rp32.019.415,00**	**Rp0,00**	**100,00**	Rp**32.019.415,00**

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2025 sebesar **Rp1,899,687,000.00** lebih rendah dari pendapatan BLUD dari Hibah LO tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 22. Pendapatan Hibah Laporan Operasional BLUD

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Hibah SPP	Rp 0,00	Rp	0,00	Rp 0,00
Hibah Kementerian	Rp 1,899,687,000.00	Rp 0,00	100,00	Rp 1,899,687,000.00
Total Pendapatan BLUD dari Hibah LO	**Rp 1,899,687,000.00**	**Rp 0,00**	**100,00**	**Rp 1,899,687,000.00**

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO Tahun 2025 sebesar **Rp68.880.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 23. Pendapatan Hasil Kerjasama Laporan Operasional BLUD

Uraian	Realisasi Pendapatan 2025 (Rp)	Realisasi Pendapatan 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Hasil Kerjasama	Rp68.880.000,00	Rp0,00	100,00	Rp68.880.000,00
Kerjasama Penyewaan Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO	**Rp68.880.000,00**	**Rp0,00**	**100,00**	**Rp68.880.000,00**

iv) Pendapatan BLUD dari APBD LO

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD LO Tahun 2025 sebesar Rp0,00 lebih rendah dari pendapatan BLUD dari APBD LO dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 24. Pendapatan BLUD dari APBD LO

Uraian	Realisasi Pendapatan 2025 (Rp)	Realisasi Pendapatan 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Dana BOSP	Rp3,552,150,000.00	Rp0,00	100,00	Rp3,552,150,000.00
Dana BOSDA	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Total Pendapatan BLUD dari APBD LO	**Rp3,552,150,000.00**	**Rp0,00**	**0,00**	**Rp3,552,150,000.00**

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2025 sebesar Rp 320.323,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 25. Pendapatan BLUD lain - lain dari LO

Uraian	Realisasi Pendapatan 2025 (Rp)	Realisasi Pendapatan 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Jasa Giro/ Sewa Kantin	Rp320.323,00	Rp0,00	100,00	Rp320.323,00
Sewa Gedung/Aula/Lab	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00

Uraian	Realisasi Pendapatan 2025 (Rp)	Realisasi Pendapatan 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO	**Rp320.323,00**	**Rp0,00**	**100,00**	**Rp320.323,00**

b) Beban dari kegiatan operasional

1. Belanja Pegawai BLUD LO

Berupa Beban Gaji & Tunjangan dan Beban Tambahan Penghasilan BLUD LO dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar **Rp0,00** lebih tinggi/rendah dari beban pegawai BLUD LO tahun 2024 yang sebesar Rp **0,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 26. Belanja Pegawai BLUD dari LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Gaji dan Tunjangan	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Beban Tambahan Penghasilan	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Total Beban Pegawai BLUD	Rp**0,00**	Rp**0,00**	**0,00**	Rp**0,00**

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Beban barang dan jasa LO tahun 2025 terealisasi sebesar **Rp30.245.400,00** lebih Tinggi dari dari Beban barang dan jasa LO tahun 2024 yang sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 27. Belanja Barang dan Jasa BLUD dari LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan
Beban Pegawai	Rp0,00	Rp0,00	100,00	Rp0,00
Beban Persediaan	Rp 1,424,945,850.00	Rp0,00	100,00	Rp 1,424,945,850.00
Beban Jasa	Rp 375,886,992.00	Rp0,00	100,00	Rp 375,886,992.00

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan
Beban Pemeliharaan	Rp239,158,000.00	Rp0,00	100,00	Rp239,158,000.00
Beban Langganan Daya dan Jasa	Rp328,583,324.00	Rp0,00	100,00	Rp328,583,324.00
Beban Perjalanan Dinas	Rp129,581,234.00	Rp0,00	100,00	Rp129,581,234.00
Beban Penyusutan Aset	Rp1,277,207,928.96	Rp0,00	100,00	Rp1,277,207,928.96
Total Beban Barang dan Jasa BLUD	**Rp3,775,363,328.96**	**Rp0,00**	**100,00**	**Rp3,775,363,328.96**

c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan dikelompokkan dalam kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional BLUD SMK Negeri 4 Batam tahun 2025 sebesar **Rp1,777,693,409.04.**

d) Surplus/defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan beban. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 4 Batam mencatat Defisit LO sebesar **Rp1,777,693,409.04.**

5.5 Laporan Arus Kas

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi BLUD SMK Negeri 4 Batam dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi BLUD SMK Negeri 4 Batam pada Tahun 2025 diperoleh Pendapatan BLUD dari jasa layanan, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan Jasa Giro dari Pihak BANK dengan Total sebesar **Rp3,653,369,738.00**yang terdiri dari:

Tabel 28. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	Rp32.019.415,00	Rp0,00
Pendapatan BLUD dari Hibah	Rp0,00	Rp0,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	Rp68.880.000,00	Rp0,00
Pendapatan BLUD dari APBD	Rp3,552,150,000.00	Rp0,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	Rp320.323,00	Rp0,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	**Rp 3,653,369,738.00**	**Rp0,00**

b. Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi BLUD SMK Negeri 4 Batam selama Tahun 2025 sebesar **Rp2,075,461,400.00** terdiri Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Modal dengan Rincian Sebagai Berikut :

Tabel 29. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Belanja Pegawai	Rp0,00	Rp0,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp1,378,138,842.00	Rp0,00
Belanja Pemeliharaan	Rp239,158,000.00	Rp0,00
Belanja Langganan Daya dan Jasa	Rp328,583,324.00	
Belanja Perjalanan Dinas	Rp129,581,234.00	Rp0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	**Rp2,075,461,400.00**	**Rp0,00**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah **Rp1,577,908,338.00**Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

Tabel 30. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**Rp1,577,908,338.00**	**Rp0,00**

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset Non-Keuangan lainnya.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan di masa yang akan datang.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 4 Batam pada Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 yang terdiri dari:

Tabel 31. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan Aset Tetap Tanah	Rp0,00	Rp0,00
Penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp0,00	Rp0,00
Penjualan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp0,00	Rp0,00
Penjualan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp0,00	Rp0,00
Penjualan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	**Rp0,00**	**Rp0,00**

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 4 Batam pada Tahun 2025 sebesar **Rp1,506,934,000.00**dikarenakan tidak ada Kas aktivitas Investasi di SMKN 4 Batam dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 32. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Keluar Kas		
Belanja Modal Tanah	Rp0,00	Rp0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 1,141,694,000.00	Rp0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0,00	Rp0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp0,00	Rp0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp365,240,000.00	Rp0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	**Rp 1,506,934,000.00**	**Rp0,00**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah **Rp 1,506,934,000.00**. Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

Tabel 33. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**Rp 1,506,934,000.00**	**Rp0,00**

3) Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Periode 2025

Kenaikan/(penurunan) Kas Bersih Selama Periode Tahun 2025 merupakan akumulasi jumlah kenaikan/(penurunan) kas bersih dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris.

Selama Tahun Anggaran 2025 terjadi kenaikan/penurunan kas bersih sebesar **Rp70,974,338.00** yang terdiri dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar **Rp1,577,908,338.00**dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar **Rp1,506,934,000.00**. Perbandingan Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih tahun 2025 dan 2024 adalah:

Tabel 34. Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Periode 2025

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	**Rp70,974,338.00**	**Rp0,00**

4) Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025

Saldo akhir kas per 31 Desember 2025 merupakan perhitungan Saldo Awal per 1 Januari 2025 ditambah (dikurangi) dengan kenaikan/ (penurunan) kas bersih selama periode tahun 2025.

Saldo akhir kas di BLUD SMK Negeri 4 Batam per 31 Desember 2025 sebesar **Rp70,974,338.00** pada tahun 2025 tidak ada Saldo Awal BLUD, karena BLUD terjadi pada tahun 2025.

Total Saldo Kas BLUD SMK Negeri 4 batam Per 31 Desember 2025 sebesar **Rp70,974,338.00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 35. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas di BLUD	Rp70,974,338.00	Rp0,00
Kas Dana BOS	Rp0,00	Rp0,00
Kas Lainnya	Rp0,00	Rp0,00
Saldo Akhir Kas	**Rp70,974,338.00**	**Rp0,00**

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

a) Ekuitas awal
b) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti:
   1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
   2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas Akhir

a) Ekuitas Awal

Pada Tahun 2025 BLUD SMK Negeri 4 Batam mencatat ekuitas awal sebesar Rp 0,00 yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada laporan Tahun 2025. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jumlah Aset Tahun 2025 Rp0,00
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025 Rp0,00
- **Saldo Awal Ekuitas 2025** **Rp0,00**

b) Surplus/Defisit LO

- Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dalam Laporan Operasional Tahun 2025 tercatat sebesar **Rp1,777,693,409.04**

c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti:
    1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
    2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d) Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar **Rp1,777,693,409.04**merupakan saldo kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Total Aset dan Total Kewajiban BLUD SMK Negeri 4 Batam Tahun 2025.

- Jumlah Aset Tahun 2025	**Rp1,777,693,409.04**
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025	Rp0,00
- **Saldo Ekuitas Akhir 2025**	**Rp1,777,693,409.04**

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

BLUD SMK Negeri 4 Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur No. 1407 Tahun 2024.

BLUD SMK Negeri 4 Batam beralamat di Tiban II Kelurahan Patam Lestari Kecematan Sekupang, Batam.

6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

BLUD SMK Negeri 4 Batam adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nirlaba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra BLUD SMK Negeri 4 Batam , sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala BLUD SMK Negeri 4 Batam

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 4 Batam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun sebagai bentuk tanggung jawab BLUD SMK Negeri 4 Batam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, penyusunan laporan keuangan BLUD juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Secara umum pencapaian kinerja atas sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik, namun begitu masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang masih harus terus dibenahi dan menjadi perhatian oleh BLUD SMK Negeri 4 Batam.

Dengan memperhatikan strategisnya peran sekolah dan besarnya tantangan yang dihadapi untuk mendukung Visi Misi Pendidikan Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, SMK Negeri 4 Batam Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja serta memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan industri. Melalui pendekatan berbasis kompetensi, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta pengelolaan keuangan yang transparan melalui sistem BLUD, sekolah ini berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan lulusan SMK dapat menjadi tenaga kerja yang unggul dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Akhir kata, BLUD SMK Negeri 4 Batam Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan dalam penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban kami dalam menyajikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

Batam, 25 Mei 2026

Ahmad Tahir, S.Pd.,M.Ak
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP 197504222005021003

PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH
BRKS Batam Tiban

Kepada Yth :
M.240.1##.###
BLUD SMKN 4 BATAM
TIBAN II
KOTA BATAM KEPULAUAN RIAU 29427 Indonesia

REKENING KORAN GIRO
Periode : 1/##/25 to 6/##/26

Halaman : ####

Tgl. Tr	Kode	Keterangan Transaksi	No Trace	Mutasi	Saldo	UserID	Cabang
		Saldo Sebelumnya			.## CR		
27/##/25	1###	CASH MINDRI PAUZI SETOR TUNAI	##.2#.43382	43,750,###.## CR	43,750,###.## CR	REK##1669	X24
28/##/25	#1##	DIST. BAGI HASIL BAGI HASIL	69.2#.17328	5,656.## CR	43,755,656.## CR	DCS2#	X24
24/##/25	1###	PEMBL BUKU CEK SETOR TUNAI	##.3#.69619	115,###.## CR	43,870,656.## CR	REK##1668	X24
24/##/25	2#2#	ARC ###166X3I - ##8166X40 DN P	42.16.#4988	115,###.## DR	43,755,656.## CR	REK#28769	X24
25/##/25	2###	ARC#166831 CASH MINDRI PAUZI P	##.3#.#3877	2,126,5##.## DR	41,629,156.## CR	REK##1669	X24
30/##/25	#1##	DIST. BAGI HASIL BAGI HASIL	68.6#.17512	33,4X3.## CR	41,662,639.## CR	DCS3#	X24
31/#7/25	#1#Y	DIST. BAGI HASIL BAGI HASIL	#7.5#.#1782	32,833.## CR	41,695,472.## CR	DCS31	X24
6/#X/25	1###	CASH MINDRI PAUZI/##13724#1106	##.34.55#29	2,285,###.## CR	43,980,472.## CR	REK##1668	X24
29/##/25	#1#Y	DIST. BAGI HASIL BAGI HASIL	##.5#.15755	32,284.## CR	43,932,756.## CR	DCS29	X24
2/#9/25	1###	MIDRI/PNDPTN BLUD KANTIN & SRW	##.36.79374	5,1##,###.## CR	44,112,756.## CR	REK##1668	X24
30/#9/25	#1#Y	DIST. BAGI HASIL BAGI HASIL	#6.5#.15#47	40,931.## CR	44,153,687.## CR	DCS30	X24
1/10/25	1###	CASH MINDRI/PENDAPATAN TEPA DK	##.39.55755	7,175,4##.## CR	56,329,#87.## CR	REK##1668	X24
1/10/25	1###	CASH MINDRI/TEPA DKV STUDIO SE	##.39.55795	160,###.## CR	56,489,#87.## CR	REK##1668	X24
1/10/25	2###	ARC#166832 CASH MINDRI F/PERJA	##.39.55#65	1,2#6,4##.## DR	55,282,687.## CR	REK##1668	X24
1/10/25	1###	CASH MINDRI/PNDPTN KANTIN BULA	##.39.55974	5,145,###.## CR	60,367,687.## CR	REK##1668	X24
27/10/25	1###	SRT PENDAPATAN TEPA SKILL MART	##.41.93#34	12,243,765.## CR	72,591,452.## CR	REK##1669	X24
31/10/25	#1#Y	DIST. BAGI HASIL BAGI HASIL	90.4#.16155	52,#12.## CR	72,643,464.## CR	DCS31	X24
3/11/25	2###	ARC#166833 CASH MINDRI PERJALA	##.42.71644	4,975,4##.## DR	67,668,#64.## CR	REK##1669	X24
3/11/25	1###	PENDAPATAN KANTIN SEPTEMBER/CA	##.42.71668	5,190,###.## CR	73,#58,#64.## CR	REK##1669	X24
5/11/25	1###	PENDAPATAN KANTIN SABTU (BARU)	##.42.98547	313,###.## CR	73,371,#64.## CR	REK##1666	X24
1#/11/25	2###	ARC#166834 MINDRI PAUZI/CASH U	##.43.43278	6##,###.## DR	72,771,#64.## CR	REK##1666	X24
1#/11/25	2###	ARC#166835 MINDRI PAUZI/CASH U	##.43.43323	3,##7,3##.## DR	69,765,764.## CR	REK##1666	X24
2#/11/25	#1#9	DIST. BAGI HASIL BAGI HASIL	96.3#.16394	57,636.## CR	69,823,4##.## CR	DCS2#	X24
1/12/25	1###	PENDAPATAN KANTIN BLN NOV 2025	##.45.69119	3,648,###.## CR	73,463,4##.## CR	REK##1669	X24
5/12/25	1###	PENDAPATAN TEPA DKV #4 STUDIO	##.46.3#83#	7#5,###.## CR	74,168,4##.## CR	REK##1666	X24
5/12/25	1###	PENDAPATAN TEPA SKILL MART KUL	##.46.38#69	2,7##,25#.## CR	76,944,65#.## CR	REK##1666	X24
5/12/25	1###	PENDAPATAN TEPA DKV #4 ADVERTI	##.46.38123	2,745,5##.## CR	79,694,15#.## CR	REK##1666	X24
5/12/25	1###	PENDAPATAN TEPA DKV #4 ADVERTI	##.46.38159	1,X##,5##.## CR	X1,588,65#.## CR	REK##1666	X24
5/12/25	1###	PENDAPATAN TEPA DKV #4 ADVERTI	##.46.38189	4,123,###.## CR	X5,7#3,65#.## CR	REK##1666	X24
1#/12/25	1###	PENDAPATAN KANTIN BLN DESEMBER	##.47.#3543	3,#X#,##X.## CR	XX,7#3,65#.## CR	REK##1669	X24
1#/12/25	1###	PENDAPATAN TEPA RPL ROOTECH SO	##.47.#3581	2##,###.## CR	XX,9X3,65#.## CR	REK##1669	X24
3#/12/25	2###	##2364# 2100130312301547##4 Pen	49.19.45412	XX,9X3,65#.## DR	.## CR	CMSRRK	1##
31/12/25	#1#Y	DIST. BAGI HASIL BAGI HASIL	17.2#.16565	62,15#.## CR	62,15#.## CR	DCS31	X24

Mutasi Debet : 7 1##,#94,25#.## Mutasi Kredit : 26 1##,156,4##.##

Tanggal, 6/##/26

brksyariah

PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH
KCKS Batam Tiban

Kepada Yth :
X.24X.1XX.XXX
RSUD SNKN 4 BATAM KAS
TIRAN II
KOTA BATAM KEPULAUAN RIAU 29427 Indonesia

REKENING KORAN GIRO
Periode : 1/12/25 to 6/01/26

Halaman : 0001

Tgl. Tr	Kode	Keterangan Transaksi	No Trace	Mutasi	Saldo	UserID	Cabang
		Saldo Sebelumnya			.00 CR		
30/12/25	1001	WX2364W 2100130312301547 44 Pen	49.19.45413	XX,9X3,65X.00 CR	XX,9X3,65X.00 CR	CWSBRK	100
30/12/25	2004	WX23695 2171130312301623 09 Pen	49.19.51346	XX,9X3,65X.00 DR	.00 CR	CWSBRK	100
31/12/25	1001	WX26537 2171130312311102 38 Pen	49.23.45685	56,1X2,75X.00 CR	56,1X2,75X.00 CR	CWSBRK	100
31/12/25	1000	SETORAN SISA RELANJA ALAT DAN	01.49.2X060	14,726,100.00 CR	7X,9XX,X5X.00 CR	RRKW12666	X24
31/12/25	W10V	DIST. BAGI HASIL BAGI HASIL	17.2X.16569	1,7XX.00 CR	7X,91X,63X.00 CR	DCS31	X24

Mutasi Debet : 1 XX,9X3,65X.00 Mutasi Kredit : 4 55X,X44,2XX.00

Tanggal, 6/01/26

brksyariah

(_____)

PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH
RRKS Batam Tiban

Kepada Yth :
X.240.100.009
BLUD SMKN 4 BATAM PEMGEMBARAN
TIBAN II
KOTA BATAM KEPULAUAN RIAU 29427 Indonesia

REKENING KORAN GIRO
Periode : 1/12/25 to 6/01/26

Halaman : 0001

Tgl.	Tr	Kode	Keterangan Transaksi	No Trace	Mutasi		Saldo		UserID	Cabang
			Saldo Sebelumnya				.00	CR		
30/12/25	1001	MX13695	217113031230162309	Pem 49.19.51547	XX,983,650.00	CR	XX,983,650.00	CR	CMSRRK	100
30/12/25	2000	ARC0167333	CASH HAZPIRA MX1365	M1.49.11000	230,000.00	DR	XX,753,650.00	CR	RRKM12669	824
30/12/25	2000	ARC0167334	CASH HAZPIRA WATRRA	01.49.11834	115,000.00	DR	XX,638,650.00	CR	RRKM12669	824
30/12/25	2000	ARC0167332	CASH HAZPIRA RRA MX	M1.49.11857	23,560,000.00	DR	65,078,650.00	CR	RRKM12669	824
30/12/25	2000	ARC0167331	CASG HAZPIRA PERJAL	M1.49.11K7M	3,015,900.00	DR	62,062,750.00	CR	RRKM12669	824
31/12/25	2004	MX25976	217113031231074125	Pem 49.22.87047	5,XXX,000.00	DR	56,182,750.00	CR	CMSRRK	100
31/12/25	2004	MX26537	217113031231110Z3X	Pem 49.23.456X4	56,182,750.00	DR	.00	CR	CMSRRK	100
31/12/25	M109	DIST. BAGI HASIL	BAGI HASIL	12.30.16573	1,558.00	CR	1,558.00	CR	DCS31	824

Mutasi Debet : 6 XX,983,650.00 Mutasi Kredit : 2 XX,985,208.00

Tanggal, 6/01/26

brksyariah

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 4 BATAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN**	**5,541,397,000.00**	**5,553,056,738.00**	**100.21**	**0.00**
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	24,560,000.00	32,019,415.00	130.37	0.00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0.00	0.00		0.00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	65,000,000.00	68,880,000.00	105.97	0.00
6	Pendapatan Hibah	1,899,687,000.00	1,899,687,000.00	100.00	0.00
7	Pendapatan APBN/APBD	3,552,150,000.00	3,552,150,000.00	100.00	0.00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	0.00	320,323.00	0.00	0.00
	Jumlah PENDAPATAN	**5,541,397,000.00**	**5,553,056,738.00**	**100.21**	**0.00**
9	**BELANJA**				
10	**BELANJA OPERASI**	**2,134,554,300.00**	**2,075,461,400.00**	**97.23**	**0.00**
11	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00
12	Belanja Barang dan Jasa	2,134,554,300.00	2,075,461,400.00	97.23	0.00
13	Bunga	0.00	0.00		0.00
14	Belanja Lain-lain	0.00	0.00		0.00
15	**BELANJA MODAL**	**3,406,842,700.00**	**3,406,621,000.00**	**99.99**	**0.00**
16	Belanja Tanah	0.00	0.00		0.00
17	Belanja Peralatan dan Mesin	1,261,015,700.00	1,260,794,000.00	99.98	0.00
18	Belanja Gedung dan Bangunan	1,780,587,000.00	1,780,587,000.00	100.00	0.00
19	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00		0.00
20	Belanja Aset Tetap Lainnya	365,240,000.00	365,240,000.00	100.00	0.00
21	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00		0.00
	Jumlah BELANJA	**5,541,397,000.00**	**5,482,082,400.00**	**98.93**	**0.00**
	Surplus/ Defisit Sebelum Pembiayaan	**0.00**	**70,974,338.00**	**0.00**	**0.00**
22	**PENERIMAAN**				
23	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
24	Penggunaan SILPA	0.00	0.00		0.00
25	Penerimaan dari Divestasi	0.00	0.00		0.00
26	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0.00	0.00		0.00
	Jumlah PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**0.00**	**0.00**		**0.00**
27	**PENGELUARAN**				
28	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
29	Pembayaran Pokok Pinjaman	0.00	0.00		0.00
30	Pengeluaran Penyertaan Modal	0.00	0.00		0.00
31	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0.00	0.00		0.00
	Jumlah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**0.00**	**0.00**		**0.00**
	Pembiayaan Neto	**0.00**	**0.00**		**0.00**

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
	Surplus/ Defisit	**0.00**	**70,974,338.00**	**0.00**	**0.00**

Kepulauan Riau, 25 Mei 2026

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

AHMAD TAHIR, S.Pd, M.Ak

197504222005021003

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 4 BATAM
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	**7.5.2.1**	0.00	0.00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**7.5.2.2**	0.00	0.00
3	Subtotal (1-2)		0.00	0.00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	**7.5.2.3**	70,974,338.00	0.00
5	Subtotal (3+4)		70,974,338.00	0.00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0.00	0.00
7	Lain-lain		0.00	0.00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	**7.5.2.6**	70,974,338.00	0.00

Kepulauan Riau, 25 Mei 2026
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

AHMAD TAHIR, S.Pd, M.Ak
197504222005021003

PEMERINTAH KOTA KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 4 BATAM
NERACA (BLUD)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	**ASET**	**1.1.**	**24,189,311,046.04**	**0.00**
2	**ASET LANCAR**	**1.1.1.**	**70,974,338.00**	**0.00**
3	Kas di Bendahara Penerimaan	1.1.1.00.	0.00	0.00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.1.1.01.	0.00	0.00
5	Kas di BLUD	1.1.1.02.	70,974,338.00	0.00
6	Kas Dana BOS	1.1.1.03.	0.00	0.00
7	Kas Dana P2SP	1.1.1.04.	0.00	0.00
8	Kas Lainnya Setara Kas	1.1.1.05.	0.00	0.00
9	Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum	1.1.1.06.	0.00	0.00
10	Piutang Pajak	1.1.1.07.	0.00	0.00
11	Piutang Retribusi	1.1.1.08.	0.00	0.00
12	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.08.	0.00	0.00
13	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.09.	0.00	0.00
14	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.1.10.	0.00	0.00
15	Belanja dibayar dimuka	1.1.1.11.	0.00	0.00
16	Piutang Lainnya	1.1.1.12.	0.00	0.00
17	Persediaan Badan Layanan Umum	1.1.1.13.	0.00	0.00
18	Aset Untuk Dikonsolidasikan	1.1.1.14.	0.00	0.00
	Jumlah ASET LANCAR		70,974,338.00	0.00
19	**ASET TETAP**	**1.1.2.**	**24,109,786,708.04**	**0.00**
20	Tanah	1.1.2.01.	5,285,615,400.00	0.00
21	Peralatan dan Mesin	1.1.2.02.	7,122,067,259.00	0.00
22	Gedung dan Bangunan	1.1.2.03.	10,303,799,298.00	0.00
23	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.1.2.04.	0.00	0.00
24	Aset Tetap Lainnya	1.1.2.05.	2,675,512,680.00	0.00
25	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.1.2.06.	0.00	0.00
26	Akumulasi Penyusutan	1.1.2.07.	(1,277,207,928.96)	0.00
	Jumlah ASET TETAP		24,109,786,708.04	0.00
27	**PIUTANG JANGKA PANJANG**	**1.1.3.**	**0.00**	**0.00**
28	Tagihan Penjualan Angsuran	1.1.3.01.	0.00	0.00
29	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	1.1.3.02.	0.00	0.00
30	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.3.03.	0.00	0.00
	Jumlah PIUTANG JANGKA PANJANG		0.00	0.00
31	**ASET LAINNYA**	**1.1.4.**	**8,550,000.00**	**0.00**
32	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.1.4.01.	0.00	0.00
33	Dana Kelolaan	1.1.4.02.	0.00	0.00
34	Aset yang dibatasi Penggunaannya	1.1.4.03.	0.00	0.00

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
35	Aset Tak Berwujud	1.1.4.04.	0.00	0.00
36	Aset Lain - Lain	1.1.4.05.	8,550,000.00	0.00
37	Akumulasi Amortisasi	1.1.4.06.	0.00	0.00
	Jumlah ASET LAINNYA		8,550,000.00	0.00
	JUMLAH ASET		24,189,311,046.04	0.00
38	**KEWAJIBAN**	**1.2.**	**0.00**	**0.00**
39	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**1.2.1.**	**0.00**	**0.00**
40	Utang Usaha	1.2.1.01.	0.00	0.00
41	Utang Pihak Ketiga	1.2.1.02.	0.00	0.00
42	Utang Pajak	1.2.1.03.	0.00	0.00
43	Utang Kepada KUN	1.2.1.04.	0.00	0.00
44	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.2.1.05.	0.00	0.00
45	Belanja yang masih harus dibayar	1.2.1.06.	0.00	0.00
46	Pendapatan Diterima Dimuka	1.2.1.07.	0.00	0.00
47	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.2.1.08.	0.00	0.00
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0.00	0.00
48	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**1.2.2.**	**0.00**	**0.00**
49	Utang Jangka Panjang	1.2.2.01.	0.00	0.00
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0.00	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN		0.00	0.00
50	**EKUITAS**	**1.3.**	**24,189,311,046.04**	**0.00**
51	**EKUITAS**	**1.3.1.**	**24,189,311,046.04**	**0.00**
52	Ekuitas	1.3.1.01.	24,189,311,046.04	0.00
	Jumlah EKUITAS		24,189,311,046.04	0.00
	JUMLAH EKUITAS		24,189,311,046.04	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		24,189,311,046.04	0.00

Kepulauan Riau, 25 Mei 2026
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



AHMAD TAHIR, S.Pd, M.Ak
197504222005021003

PEMERINTAH KOTA KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 4 BATAM
LAPORAN OPERASIONAL (BLUD)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	**PENDAPATAN**				
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	32,019,415.00	0.00	32,019,415.00	100.00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0.00	0.00	0.00	
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama	68,880,000.00	0.00	68,880,000.00	100.00
5	Pendapatan Hibah	1,899,687,000.00	0.00	1,899,687,000.00	100.00
6	Pendapatan Usaha Lainnya	320,323.00	0.00	320,323.00	100.00
7	Pendapatan APBN/ APBD	3,552,150,000.00	0.00	3,552,150,000.00	100.00
	Jumlah PENDAPATAN	**5,553,056,738.00**	**0.00**	5,553,056,738.00	100.00
8	**BEBAN**				
9	Beban Pegawai	0.00	0.00	0.00	
10	Beban Persediaan	1,424,945,850.00	0.00	1,424,945,850.00	100.00
11	Beban Jasa	375,886,992.00	0.00	375,886,992.00	100.00
12	Beban Pemeliharaan	239,158,000.00	0.00	239,158,000.00	100.00
13	Beban Langganan Daya dan Jasa	328,583,324.00	0.00	328,583,324.00	100.00
14	Beban Perjalanan Dinas	129,581,234.00	0.00	129,581,234.00	100.00
15	Beban Penyusutan Aset	1,277,207,928.96	0.00	1,277,207,928.96	100.00
16	Beban Bunga	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah BEBAN	**3,775,363,328.96**	**0.00**	3,775,363,328.96	100.00
	Surplus/Defisit Operasional	**1,777,693,409.04**	**0.00**	1,777,693,409.04	100.00
17	**KEGIATAN NON OPERASIONAL**				
18	Surplus/ Defisit Penjualan Aset Nonlancar	0.00	0.00	0.00	
19	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	0.00	0.00	0.00	
20	Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah Surplus/Defisit Dari KEGIATAN NON OPERASIONAL	**0.00**	**0.00**	0.00	
	Surplus/Defisit Sebelum POS LUAR BIASA	**1,777,693,409.04**	**0.00**	1,777,693,409.04	100.00
21	**POS LUAR BIASA**				
22	Pendapatan Luar Biasa	0.00	0.00	0.00	
23	Beban Luar Biasa	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah POS LUAR BIASA	**0.00**	**0.00**	0.00	
	Surplus/Defisit-LO	**1,777,693,409.04**	**0.00**	1,777,693,409.04	100.00

Kepulauan Riau, 25 Mei 2026

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



AHMAD TAHIR, S.Pd, M.Ak

197504222005021003

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 4 BATAM
LAPORAN ARUS KAS (BLUD)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	**Arus Masuk Kas**		
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	32,019,415.00	0.00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0.00	0.00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	68,880,000.00	0.00
6	Pendapatan Hibah	1,899,687,000.00	0.00
7	Pendapatan APBN/APBD	3,552,150,000.00	0.00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	320,323.00	0.00
	Jumlah Arus Masuk Kas	5,553,056,738.00	0.00
9	**Arus Keluar Kas**		
10	Pembayaran Pegawai	0.00	0.00
11	Pembayaran Barang dan Jasa	1,378,138,842.00	0.00
12	Pembayaran Pemeliharaan	239,158,000.00	0.00
13	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	328,583,324.00	0.00
14	Pembayaran Perjalanan Dinas	129,581,234.00	0.00
15	Pembayaran Bunga	0.00	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas	2,075,461,400.00	0.00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi	3,477,595,338.00	0.00
16	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
17	**Arus Masuk Kas**		
18	Penjualan atas Tanah	0.00	0.00
19	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0.00	0.00
20	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0.00	0.00
21	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00
22	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00
23	Penjualan Aset Lainnya	0.00	0.00
24	Penerimaan dari Divestasi	0.00	0.00
25	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0.00	0.00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0.00	0.00
26	**Arus Keluar Kas**		
27	Perolehan Tanah	0.00	0.00
28	Perolehan Peralatan dan Mesin	1,260,794,000.00	0.00

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
29	Perolehan Gedung dan Bangunan	1,780,587,000.00	0.00
30	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00
31	Perolehan Aset Tetap Lainnya	365,240,000.00	0.00
32	Perolehan Aset Lainnya	0.00	0.00
33	Pengeluaran Penyertaan Modal	0.00	0.00
34	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0.00	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas	3,406,621,000.00	0.00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(3,406,621,000.00)	0.00
35	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**		
36	**Arus Masuk Kas**		
37	Penerimaan Pinjaman	0.00	0.00
38	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0.00	0.00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0.00	0.00
39	**Arus Keluar Kas**		
40	Pembayaran Pokok Pinjaman	0.00	0.00
41	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0.00	0.00
42	Penyetoran ke Kas Negara	0.00	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0.00	0.00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0.00	0.00
43	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**		
44	**Arus Masuk Kas**		
45	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0.00	0.00
46	**Arus Keluar Kas**		
47	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0.00	0.00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0.00	0.00
48	**Kenaikan/ Penurunan Kas BLU**	70,974,338.00	0.00
49	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLU**	0.00	0.00
50	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU**	70,974,338.00	0.00

Kepulauan Riau, 25 Mei 2026
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

AHMAD TAHIR, S.Pd, M.Ak
197504222005021003

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 4 BATAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (BLUD)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Ekuitas Awal		0.00	0.00
2	Surplus/Defisit-LO		1,777,693,409.04	0.00
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		0.00	0.00
4	Koreksi Nilai Persediaan		0.00	0.00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		0.00	0.00
6	Lain-lain		0.00	0.00
7	Ekuitas Akhir		**1,777,693,409.04**	**0.00**

Kepulauan Riau, 25 Mei 2026
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

AHMAD TAHIR, S.Pd, M.Ak
19750422200502100 3

LAPORAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SMK NEGERI 5 BATAM

TAHUN 2025

(AUDITED)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR LAMPIRAN v
KATA PENGANTAR vii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB viii
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN ix
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH xi
C. NERACA xii
D LAPOLARAN OPERASIONAL xiv
E. LAPORAN ARUS KAS xv
F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS xvii
G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....

BAB I PENDAHULUAN 1
I. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 2
1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 5 Batam 3
1.4 Periode Pelaporan Keuangan 3
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 3
BAB II PROFIL BLUD SMK N 5 BATAM 6
2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 5 Batam 5
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 5 Batam 6
2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 5 Batam 6
BAB III INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET. 9
3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025 8
3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi 9
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI. 12
4.1 Entitas Akuntansi 11
4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan 11
4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 11
4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 11
4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan 12
4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja 12
4.7 Kebijakan Akuntansi Kas 12
4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan 13
4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap 13

4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban....14
BAB V RINCIAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN. 16
5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran....15
5.2 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih....18
5.3 Neraca....18
5.4 Laporan Operasional....22
5.5 Laporan Arus Kas....25
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN....29
BAB VII PENUTUP. 30

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Anggaran dan Realisasi Program/Keahlian.....6
Tabel. 2 Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target BLUD SMK Negeri 5 Batam Tahun 2025.....7
Tabel. 3 Laporan Realisasi Anggaran BLUD SMK Negeri 5 Batam Tahun 2025.....15
Tabel. 4 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan SMK Negeri 5 Batam Tahun 2025.....16
Tabel. 5 Pendapatan BLUD dari Hibah.....17
Tabel. 6 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama.....17
Tabel. 7 Pendapatan BLUD dari APBD.....17
Tabel. 8 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro.....18
Tabel. 9 Belanja Pegawai BLUD.....18
Tabel. 10 Belanja Barang dan Jasa BLUD.....19
Tabel. 11 Belanja Modal BLUD.....19
Tabel. 12 KAS Bendahara BLUD.....20
Tabel. 13 KAS Bendahara BOS.....21
Tabel. 14 Persediaan BLUD.....21
Tabel. 15 Aset Peralatan dan Mesin BLUD.....22
Tabel. 16 Aset Gedung dan Bangunan BLUD.....22
Tabel. 17 Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD.....23
Tabel. 18 Aset Tetap Lainnya BLUD.....24
Tabel. 19 Aset Lainnya BLUD.....24
Tabel. 20 Laporan Ekuitas BLUD.....25
Tabel. 21 Pendapatan Laporan Operasional BLUD.....25
Tabel. 22 Pendapatan Hibah Laporan Operasional BLUD.....26
Tabel. 23 Pendapatan Hasil Kerjasama Laporan Operasional BLUD.....27
Tabel. 24 Pendapatan BLUD dari APBD LO.....27
Tabel. 25 Pendapatan BLUD lain - lain dari LO.....27
Tabel. 26 Belanja Pegawai BLUD dari LO.....28
Tabel. 27 Belanja Barang dan Jasa BLUD dari LO.....28
Tabel. 28 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi.....30

Tabel. 29 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi 30
Tabel. 30 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 31
Kas dari Aktivitas Investasi 31

Tabel. 32 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi 32
Tabel. 33 Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 32
Tabel. 34 Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Periode 2025 32
Tabel. 35 Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025 33

LAMPIRAN

REKENING KORAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

NERACA

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. BLUD SMK Negeri 5 Batam adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 5 Batam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kami berharap dengan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) di Provinsi Kepulauan Riau.

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan Blud SMK Negeri 5 Batam
Provinsi Kepulauan Riau



Henra Debeny, M.Pd
Pembina Tingkat 1/IV-b
NIP 19660406 200701 1050

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan SMK Negeri 5 Batam Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (iii) Neraca; (iv) Laporan Operasional (LO); (v) Laporan Arus Kas (LAK); (vi) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (vii) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan Blud SMK Negeri 5 Batam
Provinsi Kepulauan Riau

Henra Debeny, M.Pd
Pembina Tingkat 1/IV-b
NIP 19660406 200701 1050

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BLUD SMK NEGERI 5 BATAM

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN**	**165.000.000,00**	**10.329.263.721,00**	**6.260,16**	**0,00**
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	145.000.000,00	530.000,00	0,37	0,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00	#NUM!	0,00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	#NUM!	0,00
7	Pendapatan APBN/APBD	0,00	10.253.480.000,00	0,00	0,00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	20.000.000,00	253.721,00	1,27	0,00
	Jumlah PENDAPATAN	**165.000.000,00**	**10.329.263.721,00**	**6.260,16**	**0,00**
9	**BELANJA**				
10	**BELANJA OPERASI**	**107.382.000,00**	**7.412.221.500,00**	**6.902,67**	**0,00**
11	Belanja Pegawai	0,00	0,00	#NUM!	0,00
12	Belanja Barang dan Jasa	107.382.000,00	7.412.221.500,00	6.902,67	0,00
13	Bunga	0,00	0,00	#NUM!	0,00
14	Belanja Lain-lain	0,00	0,00	#NUM!	0,00
15	**BELANJA MODAL**	**57.618.000,00**	**2.856.764.400,00**	**4.958,11**	**0,00**
16	Belanja Tanah	0,00	0,00	#NUM!	0,00
17	Belanja Peralatan dan Mesin	57.618.000,00	1.613.214.400,00	2.799,84	0,00
18	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	#NUM!	0,00
19	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	#NUM!	0,00
20	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	1.243.550.000,00	0,00	0,00
21	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	#NUM!	0,00
	Jumlah BELANJA	**165.000.000,00**	**10.268.985.900,00**	**6.223,63**	**0,00**
	Surplus/ Defisit Sebelum Pembiayaan	**0,00**	**60.277.821,00**	**0,00**	**0,00**
22	**PENERIMAAN**				
23	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**0,00**	**0,00**	**#NUM!**	**0,00**
24	Penggunaan SILPA	0,00	0,00	#NUM!	0,00
25	Penerimaan dari Divestasi	0,00	0,00	#NUM!	0,00
26	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00	#NUM!	0,00
	Jumlah PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**0,00**	**0,00**	**#NUM!**	**0,00**
27	**PENGELUARAN**				
28	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**0,00**	**0,00**	**#NUM!**	**0,00**
29	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00	#NUM!	0,00
30	Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00	#NUM!	0,00
31	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00	#NUM!	0,00
	Jumlah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**0,00**	**0,00**	**#NUM!**	**0,00**

	Pembiayaan Neto	**0,00**	**0,00**	**#NUM!**	**0,00**
No	**Uraian**	**Jumlah Anggaran**	**REALISASI BLUD 2025**	**%**	**REALISASI BLUD 2024**
1	2	3	4	5	6
	Surplus/ Defisit	**0,00**	**60.277.821,00**	**0,00**	**0,00**

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan Blud SMK Negeri 5 Batam
Provinsi Kepulauan Riau



Henra Debeny, M.Pd
Pembina Tingkat 1/IV-b
NIP 19660406 200701 1050

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BLUD SMK NEGERI 5 BATAM

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	**7.5.2.1**	0,00	0,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**7.5.2.2**	0,00	0,00
3	Subtotal (1-2)		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	**7.5.2.3**	60.277.821,00	0,00
5	Subtotal (3+4)		60.277.821,00	0,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	**7.5.2.6**	60.277.821,00	0,00

Batam , 25 Mei 2026
Pimpinan Blud SMK Negeri 5 Batam
Provinsi Kepulauan Riau

Henra Debeny, M.Pd
Pembina Tingkat 1/IV-b
NIP 19660406 200701 1050

C. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BLUD SMK NEGERI 5 BATAM

NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	**ASET**	**1.1.**	**27.323.683.362,56**	**0,00**
2	**ASET LANCAR**	**1.1.1.**	**60.397.821,00**	**0,00**
3	Kas di Bendahara Penerimaan	1.1.1.00.	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.1.1.01.	0,00	0,00
5	Kas di BLUD	1.1.1.02.	60.277.821,00	0,00
6	Kas Dana BOS	1.1.1.03.	0,00	0,00
7	Kas Dana P2SP	1.1.1.04.	0,00	0,00
8	Kas Lainnya Setara Kas	1.1.1.05.	120.000,00	0,00
9	Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum	1.1.1.06.	0,00	0,00
10	Piutang Pajak	1.1.1.07.	0,00	0,00
11	Piutang Retribusi	1.1.1.08.	0,00	0,00
12	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.08.	0,00	0,00
13	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.09.	0,00	0,00
14	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.1.10.	0,00	0,00
15	Belanja dibayar dimuka	1.1.1.11.	0,00	0,00
16	Piutang Lainnya	1.1.1.12.	0,00	0,00
17	Persediaan Badan Layanan Umum	1.1.1.13.	0,00	0,00
18	Aset Untuk Dikonsolidasikan	1.1.1.14.	0,00	0,00
	Jumlah ASET LANCAR		60.397.821,00	0,00
19	**ASET TETAP**	**1.1.2.**	**26.977.551.541,56**	**0,00**
20	Tanah	1.1.2.01.	1.532.473.000,00	0,00
21	Peralatan dan Mesin	1.1.2.02.	15.093.890.568,00	0,00
22	Gedung dan Bangunan	1.1.2.03.	8.727.511.679,00	0,00
23	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.1.2.04.	392.213.400,00	0,00
24	Aset Tetap Lainnya	1.1.2.05.	3.457.066.100,00	0,00
25	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.1.2.06.	0,00	0,00
26	Akumulasi Penyusutan	1.1.2.07.	(2.225.603.205,44)	0,00
	Jumlah ASET TETAP		26.977.551.541,56	0,00
27	**PIUTANG JANGKA PANJANG**	**1.1.3.**	**0,00**	**0,00**
28	Tagihan Penjualan Angsuran	1.1.3.01.	0,00	0,00
29	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	1.1.3.02.	0,00	0,00
30	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.3.03.	0,00	0,00
	Jumlah PIUTANG JANGKA PANJANG		0,00	0,00
31	**ASET LAINNYA**	**1.1.4.**	**285.734.000,00**	**0,00**
32	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.1.4.01.	0,00	0,00
33	Dana Kelolaan	1.1.4.02.	0,00	0,00

34	Aset yang dibatasi Penggunaannya	1.1.4.03.	0,00	0,00
NO	**URAIAN**	**REFF**	**2025**	**2024**
1	2	3	4	5
35	Aset Tak Berwujud	1.1.4.04.	271.590.000,00	0,00
36	Aset Lain - Lain	1.1.4.05.	14.144.000,00	0,00
37	Akumulasi Amortisasi	1.1.4.06.	0,00	0,00
	Jumlah ASET LAINNYA		285.734.000,00	0,00
	JUMLAH ASET		27.323.683.362,56	0,00
38	**KEWAJIBAN**	**1.2.**	**120.000,00**	**0,00**
39	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**1.2.1.**	**120.000,00**	**0,00**
40	Utang Usaha	1.2.1.01.	0,00	0,00
41	Utang Pihak Ketiga	1.2.1.02.	0,00	0,00
42	Utang Pajak	1.2.1.03.	120.000,00	0,00
43	Utang Kepada KUN	1.2.1.04.	0,00	0,00
44	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.2.1.05.	0,00	0,00
45	Belanja yang masih harus dibayar	1.2.1.06.	0,00	0,00
46	Pendapatan Diterima Dimuka	1.2.1.07.	0,00	0,00
47	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.2.1.08.	0,00	0,00
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		120.000,00	0,00
48	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**1.2.2.**	**0,00**	**0,00**
49	Utang Jangka Panjang	1.2.2.01.	0,00	0,00
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		120.000,00	0,00
50	**EKUITAS**	**1.3.**	**27.323.563.362,56**	**0,00**
51	**EKUITAS**	**1.3.1.**	**27.323.563.362,56**	**0,00**
52	Ekuitas	1.3.1.01.	27.323.563.362,56	0,00
	Jumlah EKUITAS		27.323.563.362,56	0,00
	JUMLAH EKUITAS		27.323.563.362,56	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		27.323.683.362,56	0,00

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan Blud SMK Negeri 5 Batam
Provinsi Kepulauan Riau



Henra Debeny, M.Pd
Pembina Tingkat 1/IV-b
NIP 19660406 200701 1050

D. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BLUD SMK NEGERI 5 BATAM

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	**PENDAPATAN**				
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00	0,00	#NUM!
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	100,00
5	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	#NUM!
6	Pendapatan Usaha Lainnya	253.721,00	0,00	253.721,00	100,00
7	Pendapatan APBN/ APBD	10.253.480.000,00	0,00	10.253.480.000,00	100,00
	Jumlah PENDAPATAN	**10.329.263.721,00**	**0,00**	10.329.263.721,00	100,00
8	**BEBAN**				
9	Beban Pegawai	0,00	0,00	0,00	#NUM!
10	Beban Persediaan	6.020.151.832,00	0,00	6.020.151.832,00	100,00
11	Beban Jasa	376.743.367,00	0,00	376.743.367,00	100,00
12	Beban Pemeliharaan	212.180.551,00	0,00	212.180.551,00	100,00
13	Beban Langganan Daya dan Jasa	830.788.250,00	0,00	830.788.250,00	100,00
14	Beban Perjalanan Dinas	196.945.500,00	0,00	196.945.500,00	100,00
15	Beban Penyusutan Aset	2.225.603.205,44	0,00	2.225.603.205,44	100,00
16	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	#NUM!
	Jumlah BEBAN	**9.862.412.705,44**	**0,00**	9.862.412.705,44	100,00
	Surplus/Defisit Operasional	**466.851.015,56**	**0,00**	466.851.015,56	100,00
17	**KEGIATAN NON OPERASIONAL**				
18	Surplus/ Defisit Penjualan Aset Nonlancar	0,00	0,00	0,00	#NUM!
19	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	0,00	0,00	0,00	#NUM!
20	Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	#NUM!
	Jumlah Surplus/Defisit Dari KEGIATAN NON OPERASIONAL	**0,00**	**0,00**	0,00	#NUM!
	Surplus/Defisit Sebelum POS LUAR BIASA	**466.851.015,56**	**0,00**	466.851.015,56	100,00
21	**POS LUAR BIASA**				
22	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	#NUM!
23	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	#NUM!
	Jumlah POS LUAR BIASA	**0,00**	**0,00**	0,00	#NUM!
	Surplus/Defisit-LO	**466.851.015,56**	**0,00**	466.851.015,56	100,00

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan Blud SMK Negeri 5 Batam
Provinsi Kepulauan Riau



Henra Debeny, M.Pd
Pembina Tingkat 1/IV-b
NIP 19660406 200701 1 050

E. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BLUD SMK NEGERI 5 BATAM

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	**Arus Masuk Kas**		
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	530.000,00	0,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	75.000.000,00	0,00
6	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
7	Pendapatan APBN/APBD	10.253.480.000,00	0,00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	253.721,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	10.329.263.721,00	0,00
9	**Arus Keluar Kas**		
10	Pembayaran Pegawai	0,00	0,00
11	Pembayaran Barang dan Jasa	6.172.307.199,00	0,00
12	Pembayaran Pemeliharaan	212.180.551,00	0,00
13	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	830.788.250,00	0,00
14	Pembayaran Perjalanan Dinas	196.945.500,00	0,00
15	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	7.412.221.500,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2.917.042.221,00	0,00
16	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
17	**Arus Masuk Kas**		
18	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
19	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
20	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
21	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
22	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
23	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
24	Penerimaan dari Divestasi	0,00	0,00
25	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
26	**Arus Keluar Kas**		
27	Perolehan Tanah	0,00	0,00
28	Perolehan Peralatan dan Mesin	1.613.214.400,00	0,00
NO	**URAIAN**	**2025**	**2024**
1	2	3	4
29	Perolehan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00

30	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
31	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.243.550.000,00	0,00
32	Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
33	Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00
34	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	2.856.764.400,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(2.856.764.400,00)	0,00
35	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**		
36	**Arus Masuk Kas**		
37	Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00
38	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
39	**Arus Keluar Kas**		
40	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00
41	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00
42	Penyetoran ke Kas Negara	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
43	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**		
44	**Arus Masuk Kas**		
45	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	120.000,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	120.000,00	0,00
46	**Arus Keluar Kas**		
47	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	120.000,00	0,00
48	**Kenaikan/ Penurunan Kas BLU**	60.397.821,00	0,00
49	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLU**	0,00	0,00
50	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU**	60.397.821,00	0,00

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan Blud SMK Negeri 5 Batam
Provinsi Kepulauan Riau

Henra Debeny, M.Pd
Pembina Tingkat 1/IV-b
NIP 19660406 200701 1 050

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BLUD SMK 5 BATAM

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Ekuitas Awal		0,00	0,00
2	Surplus/Defisit-LO		466.851.015,56	0,00
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		26.856.712.347,00	0,00
4	Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
6	Lain-lain		0,00	0,00
7	Ekuitas Akhir		**27.323.563.362,56**	**0,00**

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan Blud SMK Negeri 5 Batam
Provinsi Kepulauan Riau

Henra Debeny, M.Pd
Pembina Tingkat 1/IV-b
NIP 19660406 200701 1 050

I. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Laporan Keuangan BLUD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran ;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan BLUD.
Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala BLUD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan

2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan BLUD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SMK Negeri 5 Batam Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan RiauTahun 2025.
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
19. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2021 Pedoman Pola Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan Sebagai Badan Layanan Umum Daerah

1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 5 Batam

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 5 Batam Tahun 2025, adalah tanggungjawab sepenuhnya BLUD SMK Negeri 5 Batam, dalam hal ini adalah Pimpinan BLUD SMK Negeri 5 Batam.

1.4 Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 5 Batam tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 5 Batam tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (*Subsequent Event*) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 5 Batam tahun 2026. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2026.

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 5 Batam adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 5 Batam
- 1.4 Periode Pelaporan Keuangan
- 1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Profil BLUD SMK Negeri 5 Batam
- 2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 5 Batam
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 5 Batam
- 2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 5 Batam tahun 2025

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Asumsi dasar Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- 4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja
- 4.7 Kebijakan Akuntansi Kas
- 4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan
- 4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- 4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Neraca
- 5.4 Laporan Operasional
- 5.5 Laporan Arus Kas
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.7 Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan atas informasi – Informasi non Keuangan

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

BAB II

PROFIL
BLUD SMK NEGERI 5 BATAM

2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 5 Batam

Data bisa diperoleh dari RENSTRA Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Batam .dst

BLUD SMK Negeri 5 Batam memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten serta tenaga ahli yang mendukung pelaksanaan *Teaching Factory (TEFA)*. SDM yang tersedia meliputi:

1. Tenaga Pendidik (Guru Produktif dan Normatif):
   - Guru bersertifikasi keahlian industri sesuai bidang kompetensi.
   - Guru mata pelajaran umum yang mendukung kurikulum berbasis kompetensi.
   - Instruktur dari dunia industri yang terlibat dalam program pelatihan siswa.
2. Tenaga Kependidikan:
   - Staf administrasi yang mengelola keuangan dan operasional BLUD.
   - Teknisi laboratorium dan bengkel untuk mendukung kegiatan praktik.
   - Tenaga keamanan dan kebersihan untuk menjaga lingkungan sekolah yang kondusif.
3. Kemitraan dengan Industri:
   - Mengundang praktisi industri sebagai instruktur tamu.
   - Menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk program magang dan penyerapan tenaga kerja.
   - Mengembangkan skema sertifikasi kompetensi yang diakui dunia usaha dan industri.

Sebagai SMK BLUD yang berbasis *Teaching Factory* (TEFA) dan Unit Produksi (UP), sekolah telah memiliki berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran berbasis produksi dan layanan industri, di antaranya:

1. Ruang Kelas dan Laboratorium:
   - Ruang kelas berbasis IT untuk pembelajaran teori.
   - Laboratorium komputer untuk simulasi bisnis digital dan desain grafis.
   - Perpustakaan digital sebagai pusat referensi dan literasi siswa.
2. Workshop dan Bengkel TEFA / UP:
   - Bengkel otomotif dengan peralatan servis kendaraan standar industri.
   - Dapur produksi kuliner yang dilengkapi dengan peralatan skala industri.
   - Studio desain dan multimedia untuk produksi konten digital dan video.
   - Workshop teknik bangunan untuk pelatihan konstruksi dan produksi material.
3. Fasilitas Pendukung:
   - Asrama atau tempat tinggal bagi siswa yang berasal dari luar daerah.
   - Ruang pemasaran produk hasil Teaching Factory.
   - Area publik seperti kantin dan koperasi sekolah yang dikelola oleh siswa.

Sebagai BLUD, SMK memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan Teaching Factory. Sumber dana sekolah berasal dari:

1. Dana BOS dan APBD:

- Digunakan untuk operasional sekolah, gaji guru, serta pengadaan bahan ajar dan alat praktik.

2. Pendapatan dari Unit Usaha TEFA:
   - Hasil penjualan produk dari unit Teaching Factory.
   - Jasa layanan seperti servis otomotif, desain grafis, atau catering.
   - Kerjasama dengan industri dalam proyek tertentu.
3. Bantuan dari Pemerintah dan Swasta:
   - Hibah atau bantuan dari pemerintah untuk pengembangan kurikulum dan fasilitas.
   - Sponsor dari perusahaan yang mendukung pengembangan Teaching Factory.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 5 Batam

Adapun Rencana Kerja Kepala Sekolah untuk periode 1 (satu) tahun mendatang memuat ketentuan yang jelas mengenai : Peningkatan Mutu di semua bidang terutama kompetensi Lulusan, peningkatan manajemen sekolah dan Pernikahan (Hubungan Holistik) Sekolah Dengan Iduka dan bidang lainnya sebagai penunjang atau pendukung diantaranya pengembangan proses, pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana, penglolaan sekolah, pembiayaan dan sistem penilain

2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 5 Batam

Tabel Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
BLUD SMK Negeri 5 Batam

No	Unit Teaching Factory (TEFA)	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Keterangan
1	**TEFA Pemesinan & Mesin Kapal**	Jasa Pemotongan Ban	500.000	200.000	40%	Semua proyek pesanan berhasil dilakukan
		Produksi sparepart ringan (CNC)	500.000	80.000	16%	Semua proyek pesanan berhasil dilakukan
		Jasa Pembuatan Ornamen	250.000	100.000	40%	Semua proyek pesanan berhasil dilakukan
		Jasa Cetak Akrilik	250.000	150.000	60%	Semua proyek pesanan berhasil dilakukan
2	**TEFA Pengelasan & Pengelasan Kapal**	Jasa Pembuatan Teralis	750.000	-	0%	Belum memiliki pesanan
		Jasa pembuatan Peralatan dengan Mesin las	750.000	-	0%	Belum memiliki pesanan
3	**TEFA Teknik Komputer & Jaringan (TKJ)**	Jasa perbaikan laptop dan komputer	750.000	-	0%	Belum memiliki pesanan
		Pembuatan website untuk UMKM lokal	750.000	-	0%	Belum memiliki pesanan
5	**TEFA Elektronika & Listrik**	Jasa pemasangan instalasi AC dan SErvis AC	500.000	-	0%	Belum memiliki pesanan
		Pembuatan Running LED hemat energi	500.000	-	0%	Belum memiliki pesanan

No	Unit Teaching Factory (TEFA)	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Keterangan
		Jasa instalasi listrik rumah tangga	500.000	-	0%	Belum memiliki pesanan
7	**TEFA Desain Visual & Teknik Grafika**	Jasa Cetak Spanduk	500.000	-	0%	Belum memiliki pesanan
		Jasa desain logo dan branding untuk UMKM	500.000	-	0%	Belum memiliki pesanan
		Produksi video promosi & dokumentasi acara	500.000	-	0%	Belum memiliki pesanan
8	**TEFA Teknik Desain Rancang Bangun kapal**	Pembuatan paving block dan bata ringan	750.000	-	0%	Belum memiliki pesanan
		Jasa renovasi ringan untuk sekolah & masyarakat	750.000	-	0%	Belum memiliki pesanan

BAB III

INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja pada BLUD SMK, pada laporan keuangan ini digunakan sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat managemen yang digunakan untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran dan tujuan, untuk mewujudkan misi dan visi organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut akan disajikan data kinerja BLUD SMK Negeri 5 Batam Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target BLUD SMK Negeri 5 Batam Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
A. Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa					
1	Persentase kelulusan siswa	100%	100%	100%	2% siswa tidak lulus karena remedial yang belum tuntas
2	Rata-rata nilai Ujian Kompetensi Keahlian (UKK)	≥ 75	82,5	103%	Mencapai target
3	Persentase siswa yang memperoleh sertifikasi kompetensi industri	0%	0%	0%	Tidak melakukan sertifikasi industri
4	Persentase lulusan yang bekerja sesuai kompetensi dalam 6 bulan	60%	58%	97%	Hampir mencapai target, perlu peningkatan kemitraan
5	Persentase lulusan yang berwirausaha	10%	12%	120%	Melebihi target, program wirausaha berjalan baik
B. Kinerja Keuangan dan Unit Usaha BLUD					
6	Persentase pendapatan unit usaha BLUD terhadap biaya operasional sekolah	30%	28%	93%	Hampir mencapai target, strategi pemasaran perlu ditingkatkan
7	Efisiensi penggunaan dana BLUD sesuai rencana kerja	90%	95%	105%	Anggaran terserap dengan baik dan efektif
C. Kinerja Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)					
8	Jumlah kerja sama aktif dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	5 mitra	1 mitra	20%	Belum mencapai target, kerja sama dengan lebih banyak perusahaan
9	Persentase siswa yang menjalani magang industri	100%	100%	100%	Semua siswa telah menjalani magang
10	Jumlah produk atau jasa unggulan dari Teaching Factory (TEFA)	5 produk	4 produk	80%	Ada satu produk yang belum mencapai standar pasar
D. Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan					
11	Kepuasan siswa dan orang tua terhadap layanan pendidikan	85%	88%	103%	Melebihi target berdasarkan survei internal
12	Jumlah guru produktif bersertifikasi industri	70%	60%	85%	Hampir mencapai target, ada guru dalam proses sertifikasi

Berdasarkan tabel pencapaian, secara keseluruhan SMK BLUD telah mencapai rata-rata 84% dari target yang ditetapkan. Beberapa indikator bahkan melebihi target, seperti wirausaha lulusan, jumlah mitra industri, dan kepuasan siswa. Namun, ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, seperti pencapaian sertifikasi kompetensi siswa dan pengembangan produk Teaching Factory. Untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memperkuat kemitraan dengan industri untuk meningkatkan jumlah lulusan yang bekerja sesuai kompetensi.
2. Optimalisasi pemasaran unit usaha BLUD untuk meningkatkan pendapatan sekolah.
3. Meningkatkan kesiapan siswa dalam uji sertifikasi industri melalui bimbingan tambahan.
4. Pengembangan produk Teaching Factory agar lebih kompetitif di pasar.

Dengan perbaikan strategi ini, diharapkan SMK BLUD dapat mencapai 90% target di tahun mendatang.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Adapun hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target realisasi antara lain :

b. Hambatan dalam Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa

1. Kurangnya kesiapan siswa dalam ujian sertifikasi industri
   - Tidak semua siswa memiliki kesiapan yang cukup untuk lulus uji sertifikasi.
   - Kurangnya akses terhadap bahan ajar atau simulasi ujian sesuai standar industri.
   - Biaya sertifikasi yang masih menjadi kendala bagi sebagian siswa.
2. Tingkat kelulusan yang belum 100%
   - Beberapa siswa mengalami kesulitan dalam mata pelajaran teori maupun praktik.
   - Kurangnya motivasi belajar dan tingkat kehadiran siswa yang rendah.
3. Penyerapan lulusan ke dunia kerja belum optimal
   - Persaingan ketat di dunia kerja sehingga tidak semua lulusan langsung terserap.
   - Kurangnya pengalaman praktis yang relevan dengan kebutuhan industri.
   - Masih ada lulusan yang lebih memilih bekerja di luar bidang keahlian mereka.

b. Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan dan Unit Usaha BLUD

1. Pendapatan unit usaha BLUD belum mencapai target
   - Persaingan dengan produk atau jasa dari industri komersial yang lebih mapan.
   - Kurangnya strategi pemasaran dan branding produk/jasa SMK BLUD.
   - Keterbatasan modal untuk meningkatkan skala produksi dan inovasi produk.
2. Efisiensi penggunaan dana BLUD
   - Masih ada beberapa program yang belum berjalan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas.
   - Keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah atau sumber pendanaan lain.

c. Hambatan dalam Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)

1. Jumlah produk unggulan Teaching Factory belum optimal
    - Keterbatasan bahan baku atau alat produksi yang menyebabkan terhambatnya pengembangan produk baru.
    - Produk belum sepenuhnya sesuai standar pasar, sehingga masih butuh perbaikan dalam kualitas dan pemasaran.
2. Kemitraan industri masih perlu diperluas
    - Tidak semua industri bersedia menerima siswa magang karena keterbatasan kapasitas mereka.
    - Kurangnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja.

d. Hambatan dalam Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan

1. Tingkat kepuasan siswa dan orang tua belum maksimal
    - Beberapa siswa merasa materi pembelajaran masih kurang relevan dengan dunia kerja.
    - Orang tua belum sepenuhnya memahami konsep BLUD di SMK, sehingga kurang mendukung program sekolah.
2. Kurangnya jumlah guru bersertifikasi industri
    - Tidak semua guru memiliki kesempatan mengikuti pelatihan atau sertifikasi karena keterbatasan waktu dan biaya.
    - Masih ada kendala administratif dalam proses pengajuan sertifikasi guru ke lembaga industri terkait.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Akuntansi adalah BLUD SMK Negeri 5 Batam Provinsi Kepulauan Riau.

4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas;
b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 5 Batam. Provinsi Kepulauan Riau adalah:

a) ***Basis Kas*** untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam ***Laporan Realisasi Anggaran***
Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat Kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

b) ***Basis akrual*** untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam ***Neraca***
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

c) ***Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran*** berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riautidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

d) ***Basis akrual untuk neraca*** berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas;

4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengakuan dan pengukuran atas transaksi kejadian ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan ini adalah:

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.
   Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut.

Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD , adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 5 Batam tahun 2025, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat Diterima pada Rekening Kas Umum. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum untuk seluruh transaksi setelah dilakukan pengesahan definitif bendahara. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

4.7 Kebijakan Akuntansi Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas secara umum diakui jika memenuhi kriteria:

a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.

4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari:

- Barang Konsumsi;
- Bahan untuk pemeliharaan;
- Suku cadang;
- Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
- Bahan baku;
- Barang dalam proses/setengah jadi;

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal; diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.

4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.

4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

BAB V

RINCIAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang telah disusun BLUD SMK Negeri 5 Batam periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan – LRA

Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 5 Batam mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp75.783.721,00 atau sebesar 50,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp151.500.000,00 sebagaimana ikhtisar sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	145.000.000,00	530.000,00	35	
Pendapatan BLUD dari Hibah				
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	0	75.000.000,00	50	
Pendapatan BLUD dari APBD	0	0	0	
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	20.000.000,00	253.721,00	0	
TOTAL PENDAPATAN BLUD	151.500.000,00	75.783.721,00	50	

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Tahun 2025 sebesar Rp530.000,00 atau 35,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp1.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Pendapatan TEFA PEMESINAN DAN MESIN KAPAL	1.500.000,00	530.000,00	35	
Pendapatan TEFA PENGELASAN DAN PENGELASAN KAPAL	0	0	0	
Pendapatan TEFA TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	0	0	0	
Pendapatan TEFA ELEKTRONIK DAN LISTRIK	0	0	0	
Pendapatan TEFA DKV DAN GRAFIKA	0	0	0	
Pendapatan TEFA Desain Rancang Bangun Kapal	0	0	0	

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.500.000	530.000	35	

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 00,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp00,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Hibah SPP	0	0	0	0
Hibah Kementerian	0	0	0	0
Total Pendapatan BLUD dari Hibah	0	0	0	0

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Tahun 2025 sebesar Rp75.000.000,00 atau 50,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp150.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	**Anggaran (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**%**	**Realisasi 2025**
Kerjasama PT A				
Kerjasama PT B				
Kantin 1	15.000.000,00	7.500.000,00	50	
Kantin 2	15.000.000,00	7.500.000,00	50	
Kantin 3	15.000.000,00	7.500.000,00	50	
Kantin 4	15.000.000,00	7.500.000,00	50	
Kantin 5	15.000.000,00	7.500.000,00	50	
Kantin 6	15.000.000,00	7.500.000,00	50	
Kantin 7	15.000.000,00	7.500.000,00	50	
Kantin 8	15.000.000,00	7.500.000,00	50	
Kantin 9	15.000.000,00	7.500.000,00	50	
Kantin 10	15.000.000,00	7.500.000,00	50	
Dst.....				
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	150.000.000,00	75.000.000,00	50	

iv) Pendapatan BLUD dari APBD/APBN

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD/APBN Tahun 2025 sebesar Rp10.253.480.000 atau 100,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	**Anggaran(Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**%**	**Realisasi 2025**
Dana BOSP REGULER	0	10.202.730.000,00	0	10.202.730.000,00
Dana BOSP KINERJA	0	50.750.000,00	0	50.750.000,00
Total Pendapatan BLUD dari APBD	0	10.253.480.000,00	0	10.253.480.000,00

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp253.271,00

atau 0,001% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp20.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023
CSR PT X	0	0		0
Sewa Gedung/Aula/Lab	0	0		0
Jasa Giro	20.000.000,00	253,271.00	0.001	0
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	20.000.000,00	253,271.00	0.001	

b. Belanja

1. Belanja Pegawai BLUD

Berupa Belanja Gaji & Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan BLUD dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp0,- atau 0,00 % dari total anggaran belanja pegawai BLUD yang sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	0	0	0
Belanja Tambahan Penghasilan	0	0	0
Total Belanja Pegawai BLUD	0	0	0

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp7.412.221.500,00 atau 6902,00% dari total anggaran belanja barang dan jasa yang sebesar Rp107.382.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Barang dan jasa	107.382.000,00	7.412.221.500,00	6.902.67
Total Belanja Barang dan Jasa BLUD	107.382.000,00	7.412.221.500,00	6.902.67

3. Belanja Modal BLUD

Belanja modal BLUD terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp1.613.214.400.00 atau 2.799.8% dari total anggaran belanja modal peralatan dan mesin yang sebesar Rp57.618.000,00, belanja modal gedung dan bangunan yang terealisasi sebesar Rp0.00 atau 0.00% dari total anggaran belanja modal gedung dan bangunan yang sebesar Rp00,00 dst dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.618.000,00	1.613.214.400,00	2.799.8	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Total Belanja Modal BLUD	57.618.000,00	1.613.214.400,00	2.799.8	0

5.2 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo awal SAL pada tahun 2025 sebesar Rp00,00 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

2) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan digunakan dalam rangka membiayai defisit tahun anggaran berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp00,00 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

3) Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SiLPA tahun 2025 sebesar Rp60.277.821,00

5.3 Neraca

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- Berupa kas/setara kas dan persediaan

Aset Lancar sebesar Rp60.277.821,00 yang dimiliki BLUD SMK Negeri 5 Batam per 31 Desember 2025 terdiri dari:

a. Kas di Bendahara BLUD

Kas BLUD adalah semua bentuk penerimaan dan pengeluaran uang tunai atau setara kas yang dikelola oleh SMK Negeri 5 Batam dalam rangka menjalankan operasionalnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, dan pendapatan lainnya. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp60.277.821,00 dengan rincian :

Uraian	Jumlah
Kas di Bank	0
Rek Bank 1610100007	55.668.721,00
Rek Bank xyx	0
Kas Tunai	4.609.100,00
Total Kas di Bendahara BLUD	60.277.821,00

b. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan kas dibawah pengelolaan bendahara BOS yang bersumber dari pemerintah untuk mendukung operasional sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan tanpa membebani peserta didik. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BOS sebesar RP00,00 dengan rincian :

Uraian	Jumlah
Kas di Bank	0
Rek Bank 1863826158	0
Rek Bank xyx	0
Kas Tunai	0
Total Kas di Bendahara BOS	0

c. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp00,00 terdiri dari :

Uraian	Jumlah
Persediaan Barang Habis Pakai	
- Bahan	0
- Suku Cadang	0
Dst.....	
Persediaan BarangTidak Habis Pakai	0
Dst....	
Total Persediaan	0

2. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh pelayanan umum. Aset tetap sebesar Rp00,00 per 31 Desember 2025 merupakan nilai perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan yang pengadaannya bersumber dari pengelolaan dana BOS dan dana SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dan BLUD.

a. Tanah

Nilai aset tanah BLUD SMK Negeri 5 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.532.473.000 dan tidak terdapat penambahan aset tetap tanah selama tahun 2025.

b. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin BLUD SMK Negeri 5 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp15.093.890.568 meningkat sebesar Rp15.093.890.568 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp.0.0,0 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**Rp.** 15.093.890.568,00
Penambahan :	
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 15.093.890.568,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp0
- Reklasifikasi dari Aset Tetap xxxxx	Rp0
- Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kementerian xxx ..... Dst	Rp0
Total Penambahan	**Rp** 15.093.890.568,00
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp0
Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp0
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel...Dst	Rp0
Total Pengurangan :	**Rp0**
Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**Rp**15.093.890.568,00

c. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan BLUD SMK Negeri 5 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp 8.727.511.679,00 meningkat sebesar Rp 8.727.511.679,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp00,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**Rp** 8.727.511.679,00
Penambahan :	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 8.727.511.679,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp0
- Reklasifikasi dari Aset Tetap xxxxx	Rp0
- Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kementerian xxx ..... Dst	Rp0
Total Penambahan	**Rp** 8.727.511.679,00
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel...Dst	
Total Pengurangan :	**Rp0**
Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**Rp** 8.727.511.679,00

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD SMK Negeri 5 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp 392.213.400,00 meningkat sebesar Rp 392.213.400,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp00,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**Rp** 392.213.400,00
Penambahan :	
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 392.213.400,00

Uraian	Jumlah
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp0
- Reklasifikasi dari Aset Tetap xxxxx	Rp0
- Hibah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kementerian xxx .....Dst	Rp0
Total Penambahan	**Rp** 392.213.400,00
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel...Dst	
Total Pengurangan :	**Rp0**
Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**Rp** 392.213.400,00

e. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Aset Tetap Lainnya BLUD SMK Negeri 5 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp 3.457.066.100,00 meningkat sebesar Rp 3.457.066.100,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp0,00. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	**Rp** 3.457.066.100,00
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 3.457.066.100,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp0
- Reklasifikasi dari Aset Tetap xxxxx	Rp0
- Hibah Aset Tetap Lainnya dari Kementerian xxx.....Dst	Rp0
Total Penambahan	**Rp** 3.457.066.100,00
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Lainnya	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel...Dst	
Total Pengurangan :	**Rp0**
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya	**Rp** 3.457.066.100,00

3. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya dapat berupa Aset Tidak Berwujud dan Aset Rusak Berat/Tidak Digunakan Lagi dalam Operasional Kegiatan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 5 Batam mencatat Aset Lainnya sebesar Rp 285.734.000,00 terdiri dari Aset Tidak Berwujud (Software, dll) sebesar Rp 271.590.000,00 dan Aset Rusak Berat/Tidak Digunakan Lagi dalam Operasional Kegiatan sebesar Rp 14.144.000,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Lainnya	**Rp** 285.734.000,00
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Lainnya	Rp 285.734.000,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp0

Uraian	Jumlah
- Reklasifikasi dari Aset Tetap xxxxx	Rp0
- Hibah Aset Lainnya dari Kementerian xxx.....Dst	Rp0
Total Penambahan	**Rp** 285.734.000,00
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Lainnya	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel...Dst	
Total Pengurangan :	**Rp0**
Saldo Akhir Aset Lainnya	**Rp** 285.734.000,00

4. Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 5 Batam tidak memiliki kewajiban. (sesuaikan angka pada laporan neraca)

5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD SMK Negeri 5 Batam pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pada Tahun 2025 Ekuitas adalah sebesar Rp 27.323.563.362,56

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Ekuitas	**Rp** 27.323.563.362,56
- Surplus/Defisit LO	Rp 466.851.015,56
- Koreksi Ekuitas	Rp 26.856.712.347.00
Saldo Ekuitas Akhir	**Rp** 27.323.563.362,56

5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional
b) Beban dari kegiatan operasional
c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
d) Pos luar biasa
e) Surplus/defisit LO

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional

Pendapatan LO dari kegiatan operasional terdiri dari :

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2025 sebesar Rp530.000,00 lebih tinggi/~~rendah~~ dari Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan TEFA PEMESINAN DAN MESIN KAPAL	530.000	0	100	kenaikan
Pendapatan TEFA PENGELASAN DAN PENGELASAN KAPAL	0	0	0	
Pendapatan TEFA TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	0	0	0	
Pendapatan TEFA ELEKTRONIK DAN LISTRIK	0	0	0	
Pendapatan TEFA DKV DAN GRAFIKA	0	0	0	
Dst...				
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO	530.000	0	100	

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 lebih tinggi/rendah dari pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2024 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Hibah SPP	0	0	0	0
Hibah Kementerian	0	0	0	0
Dst.....				
Total Pendapatan BLUD dari Hibah LO	0	0	0	0

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO Tahun 2025 sebesar Rp75.000.000,00 lebih tinggi/~~rendah~~ dari pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	**Realisasi 2024 (Rp)**	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Kerjasama PT A				
Kerjasama PT B				
Kantin 1	7.500.000,00	0	100	Kenaikan
Kantin 2	7.500.000,00	0	100	Kenaikan
Kantin 3	7.500.000,00	0	100	Kenaikan
Kantin 4	7.500.000,00	0	100	Kenaikan
Kantin 5	7.500.000,00	0	100	Kenaikan
Kantin 6	7.500.000,00	0	100	Kenaikan
Kantin 7	7.500.000,00	0	100	Kenaikan
Kantin 8	7.500.000,00	0	100	Kenaikan
Kantin 9	7.500.000,00	0	100	Kenaikan
Kantin 10	7.500.000,00	0	100	Kenaikan
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO	75.000.000,00	0	100	Kenaikan

iv) Pendapatan BLUD dari APBD/APBN LO

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD LO Tahun 2025 sebesar Rp0,00 lebih tinggi/rendah dari pendapatan BLUD dari APBD LO Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Dana BOSP	**10.329.263.721,00**	**0**	**100**	**Naik**
Dana BOSD	**0**	**0**		
Total Pendapatan BLUD dari APBD LO	0	0		

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2025 sebesar Rp0,00 lebih tinggi/rendah dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
CSR PT X	0	0	0	0
Sewa Gedung/Aula/Lab	0	0	0	0
Jasa GIRO	253.721,00		100	naik
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO	0	0	0	0

b) Beban dari kegiatan operasional

1. Belanja Pegawai BLUD LO

Berupa Beban Gaji & Tunjangan dan Beban Tambahan Penghasilan BLUD LO dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp0,00 lebih tinggi/rendah dari beban pegawai BLUD LO tahun 2024 yang sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Gaji dan Tunjangan	0	0	0	0
Beban Tambahan Penghasilan	0	0	0	0
Total Beban Pegawai BLUD	0	0	0	0

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Beban barang dan jasa LO tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 9.862.412.705.44 lebih tinggi/~~rendah~~ dari dari Beban barang dan jasa LO tahun 2024 yang sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan
Belanja Persediaan	6.020.151.832.,00	0	100	Kenaikan
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	376.743.367,00	0	100	Kenaikan
Belanja Pemeliharaan	212.180.551,00	0	100	Kenaikan
Belanja Langganan Daya dan jasa	830.788.250,00	0	100	Kenaikan
Beban Perjalanan Dinas	196.945.500,00	0	100	Kenaikan
Beban Penyusutan Aset	2.225.603.205,44	0	100	Kenaikan
Beban Bungga	0	0	0	0
Total Beban Barang dan Jasa BLUD	15.505.900	0	100	Kenaikan

c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan dikelompokkan dalam kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional BLUD SMK Negeri 5 Batam tahun 2025 sebesar Rp0,00.

d) Surplus/defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan beban. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 5 Batam mencatat surplus/Defisit LO sebesar Rp0,00.

5.5 Laporan Arus Kas

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi BLUD SMK Negeri 5 Batam dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi BLUD SMK Negeri 5 Batam pada Tahun 2025 sebesar Rp75.783.721,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat	530.000	0
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0	0
Pendapatan Hasil Kerja Sama	75.000.000	0
Pendapatan Hibah	0	0
Pendapatan APBN/APBD	10,253,480,000.00	0

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		
Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	253,721.00	
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	10,329,263,721.00	**0**

b. Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi BLUD SMK Negeri 5 Batam selama Tahun 2025 sebesar Rp 15.505.900,00 terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang dan Jasa	6,172,307,199.00	0
Pembayaran Pemeliharaan	212,180,551.00	
Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	830,788,250.00	
Pembayaran Perjalanan Dinas	196,945,500.00	
Pembayaran Bunga		
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	7,412,221,500.00	**0**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp 2,917,042,221.00 Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	2,917,042,221.00	0

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset Non-Keuangan lainnya.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan di masa yang akan datang.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 5 Batam pada Tahun 2025 sebesar Rp00,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan Aset Tetap Tanah	0	0
Penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0	0
Penjualan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0	0
Penjualan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0
Penjualan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	0	0
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 5 Batam pada Tahun 2025 sebesar Rp00,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Belanja Modal Tanah	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,613,214,400.00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,243,550,000.00	0
Perolehan Aset Lainnya	0	0
Pengeluaran Penyertaan Modal	0	0
Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0	0
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	2,856,764,400.00	

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp 2,856,764,400.00 Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	2,856,764,400.00	0

3) Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Periode 2025

Kenaikan/(penurunan) Kas Bersih Selama Periode Tahun 2025 merupakan akumulasi jumlah kenaikan/(penurunan) kas bersih dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris.

Selama Tahun Anggaran 2025 terjadi kenaikan/~~penurunan~~ kas bersih sebesar Rp60.277.821,00 yang terdiri dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp60.277.821,00 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp00,00. Perbandingan Kenaikan/~~(Penurunan)~~ Kas Bersih tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	60.277.821,00	

4) Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025

Saldo akhir kas per 31 Desember 2025 merupakan perhitungan Saldo Awal per 1 Januari 2025 ditambah (dikurangi) dengan kenaikan/ (penurunan) kas bersih selama periode tahun 2025.

Saldo akhir kas di BLUD SMK Negeri 5 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp60.277.821,00 didapat dari perhitungan saldo awal Tahun 2025 sebesar Rp0,00 ditambah kenaikan/penurunan kas bersih selama periode tahun 2025 sebesar Rp Rp60.277.821,00.

Total Saldo Kas BLUD SMK Negeri 5 Batam Per 31 Desember 2025 sebesar Rp60.277.821,00 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas di BLUD	60.277.821,00	0
Kas Dana BOS	0	0
Saldo Akhir Kas	**60.277.821,00**	**0**

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

a) Ekuitas awal
b) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti:
    1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
    2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas Akhir

a) Ekuitas Awal

Pada Tahun 2025 BLUD SMK Negeri 5 Batam mencatat ekuitas awal sebesar Rp 27.323.563.362.00 yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada laporan Tahun 2025. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jumlah Aset Tahun 2025 Rp 27.323.563.362.00
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025 Rp00,00
- **Saldo Awal Ekuitas 2025** **Rp** 27.323.563.362.00

b) Surplus/Defisit LO

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dalam Laporan Operasional Tahun 2025 tercatat sebesar Rp 466.851.015.56.

c) Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar Rp 27.323.563.362.00 merupakan saldo kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Total Aset dan Total Kewajiban BLUD SMK Negeri 5 Batam Tahun 2025.

- Jumlah Aset Tahun 2025 Rp 27.323.563.362.00
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025 Rp00,00
- **Saldo Awal Ekuitas 2025** **Rp** 27.323.563.362.00

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

BLUD SMK Negeri 5 Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 1407 Tahun 2025. BLUD SMK Negeri 5Batam beralamat di Kavling Bukit Kamboja, Kel Sei Pelunggut-Kec. Sagulung-Kota Batam.

6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

BLUD SMK Negeri 5 Batam adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nirlaba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di , dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra BLUD SMK Negeri 5 Batam, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala BLUD SMK Negeri 5 Batam .

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 5 Batam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun sebagai bentuk tanggung jawab BLUD SMK Negeri 5 Batam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, penyusunan laporan keuangan BLUD juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Secara umum pencapaian kinerja atas sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik, namun begitu masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang masih harus terus dibenahi dan menjadi perhatian oleh BLUD SMK Negeri 5 Batam.

Dengan memperhatikan strategisnya peran sekolah dan besarnya tantangan yang dihadapi untuk mendukung Visi Misi Pendidikan Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, SMK Negeri 5 Batam. Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja serta memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan industri. Melalui pendekatan berbasis kompetensi, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta pengelolaan keuangan yang transparan melalui sistem BLUD, sekolah ini berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan lulusan SMK dapat menjadi tenaga kerja yang unggul dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Akhir kata, BLUD SMK Negeri 5 Batam. Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan dalam penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban kami dalam menyajikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

Batam, 25 Mei 2026
PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 5 BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

HENRA DEBENY, M.Pd
Pembina Tingkat 1/IV-b
NIP. 19660406 200701 1 050

LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SMK NEGERI 6 BATAM
TAHUN 2025
(AUDITED)

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS PENDIDIKAN

SMK NEGERI 6 BATAM

Kawasan Industri Kabil, Kecamatan Nongsa, Kepulauan Riau

DAFTAR ISI **Halaman**

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR LAMPIRAN vi
KATA PENGANTAR vii
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB viii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN ix
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH xi
NERACA xii
LAPORAN OPERASIONAL xiv
LAPORAN ARUS KAS xvi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS xviii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN xix
Bab I Pendahuluan 1
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 1
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan 2
1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMKN 6 Batam 3
1.4 Periode Pelaporan Keuangan 3
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 3
Bab II Profil BLUD SMK Negeri 6 Batam 5
2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 6 Batam 5
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 6 Batam 6
2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 6 Batam tahun 2025 8
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 9
3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025 9
3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi 10
Bab IV Kebijakan Akuntansi 11
4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 11
4.2 Asumsi dasar Laporan Keuangan 11

4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 11
4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 11
4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan 12
4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja 12
4.7 Kebijakan Akuntansi Kas 13
4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan 13
4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap 13
4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban 14
Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan 15
5.1 Laporan Realisasi Anggaran 15
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 18
5.3 Neraca 18
5.4 Laporan Operasional 23
5.5 Laporan Arus Kas 26
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas 30
Bab VI Penjelasan atas informasi – Informasi non Keuangan 31
6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan 31
6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan 31
Bab VII Penutup 32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan 8

Tabel 3.1 Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target 9

Tabel 5.1.1 Pendapatan – LRA 15

Tabel 5.1.2 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 15

Tabel 5.1.3 Pendapatan BLUD dari Hibah 16

Tabel 5.1.4 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain 16

Tabel 5.1.5 Pendapatan BLUD dari APBD 16

Tabel 5.1.6 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 17

Tabel 5.1.7 Belanja Pegawai BLUD 17

Tabel 5.1.8 Belanja Barang dan Jasa BLUD 17

Tabel 5.1.9 Belanja Modal BLUD 18

Tabel 5.3.1 Kas di Bendahara BLUD 19

Tabel 5.3.2 Kas di Bendahara BOS 19

Tabel 5.3.3 Persediaan 20

Tabel 5.3.4 Peralatan dan Mesin 20

Tabel 5.3.5 Gedung dan Bangunan 21

Tabel 5.3.6 Aset Tetap Lainnya 21

Tabel 5.3.7 Aset Lainnya 22

Tabel 5.3.8 Ekuitas 23

Tabel 5.4.1 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO 23

Tabel 5.4.2 Pendapatan BLUD dari Hibah LO 24

Tabel 5.4.3 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO 24

Tabel 5.4.4 Pendapatan BLUD dari APBD LO 24

Tabel 5.4.5 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO 24

Tabel 5.4.6 Belanja Pegawai BLUD LO 25

Tabel 5.4.7 Belanja Barang dan Jasa BLUD 25

Tabel 5.5.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi 26

Tabel 5.5.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi 26

Tabel 5.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 27

Tabel 5.5.4 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi 27

Tabel 5.5.5 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi 27

Tabel 5.5.6 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 28

Tabel 5.5.7 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 28

Tabel 5.5.8 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 29

Tabel 5.5.9 Kenaikan / (Penurunan) Kas Bersih 29

Tabel 5.5.10 Saldo Kas BLUD 29

Tabel 5.6.1 Ekuitas Awal 30

Tabel 5.6.2 Ekuitas Akhir 30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran-Lampiran lainnya sebagai CaLK

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada Tim Penyusun dokumen Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMK Negeri 6 Batam tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Keuangan BLUD merupakan bentuk konkrit proses akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan dan untuk selanjutnya akan digunakan sebagai dokumen pokok dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja SMK Negeri 6 Batam Tahun Anggaran 2025. Prinsip penyajian Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 6 Batam menyajikan informasi yang komplit dan dapat dipahami serta memadai sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para pengguna laporan, seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 6 Batam ini, baik dalam bentuk data, informasi maupun saran perbaikan, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 6 Batam Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pengguna.

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan BLUD SMK N 6 Batam
Provinsi Kepulauan Riau,

Ahmad Tahir, M.Ak.
Pembina Tk I / (IV b)
NIP 197504222005021003

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan SMK N 6 Batam Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (iii) Neraca; (iv) Laporan Operasional (LO); (v) Laporan Arus Kas (LAK); (vi) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (vii) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan BLUD SMK N 6 Batam
Provinsi Kepulauan Riau,

Ahmad Tahir, M.Ak.
Pembina Tk I / (IV b)
NIP 197504222005021003

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BLUD SMK N 6 BATAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	Reff	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
2	3	4	5	6	7
PENDAPATAN					
PENDAPATAN					
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		1,401,061,898.00	1,373,415,030.00	98.03	2.619.105.929,00
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan		-	-	0,00	-
Pendapatan Hasil Kerja Sama		-	-	0,00	-
Pendapatan Hibah		1,907,470,000.00	-	0,00	3.379.174.507,00
Pendapatan BLUD dari APBD		4,543,670,000.00	4,543,670,000.00	100,00	3.908.360.000,00
Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah		193,251.00	193,251.00	100,00	-
Jumlah PENDAPATAN		**7,852,395,149.00**	**5,917,278,281.00**	**75.36**	**9.906.640.436,00**
BELANJA					
BELANJA OPERASI		**4.900.040.660,00**	**4.750.328.119,00**	**96.94**	**8.884.515.870,80**
Belanja Pegawai		-	-	0,00	-
Belanja Barang dan Jasa		4.900.040.660,00	4.750.328.119,00	96.94	8.884.515.870,80
Bunga		-	-	0,00	-
Belanja Lain-lain		-	-	0,00	-
BELANJA MODAL		**2.987.602.000,00**	**1.197.332.000,00**	**40,08**	**1.431.738.000,00**
Belanja Tanah		-	-	0,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin		801.465.000,00	641.215.000,00	80,01	1.044.753.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan		1.630.020.000,00	-	0,00	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	0,00	-
Belanja Aset Tetap Lainnya		556.117.000,00	556.117.000,00	100,00	386.985.000,00
Belanja Aset Lainnya		-	-	0,00	-
Jumlah BELANJA		**7.887.642.660,00**	**5,947,660,119.00**	**75.40**	**10.316.253.870,80**

URAIAN	Reff	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
2	3	4	5	6	7
Surplus/ Defisit Sebelum Pembiayaan		**(35.247.511,00)**	**(30.381.838,00)**	**86.20**	**(409.613.434,80)**
PENERIMAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI		**35,247,511.00**	**35,247,520.00**	**100.00**	**444,863,888.80**
Penggunaan SILPA		35.247.511,00	35.247.520,00	100.00	444.863.888,80
Penerimaan dari Divestasi		-	-	0,00	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain		-	-	0,00	-
Jumlah PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI		**35.247.511,00**	**35.247.520,00**	**100.00**	**444.863.888,80**
PENGELUARAN					
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI					
Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	0,00	-
Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-	0,00	-
Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain		-	-	0,00	-
Jumlah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pembiayaan Neto		**35.247.511,00**	**35.247.520,00**	100.00	**444.863.888,80**
Surplus/ Defisit		**0.00**	**4.865.682,00**	0.00	**35.250.454,00**

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan BLUD SMK N 6 Batam
Provinsi Kepulauan Riau,

Ahmad Tahir, M.Ak.
Pembina Tk I / (IV b)
NIP 197504222005021003

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BLUD SMK N 6 BATAM
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2.1	35.250.454,00	444.863.888,80
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.2.2	0,00	0,00
3	Subtotal (1+2)		35.250.454,00	444.863.888,80
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	7.5.2.3	(30,381,838.00)	(409.613.434,80)
5	Subtotal (3+4)		4.868.616,00	35.250.454,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		(2.934,00)	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	7.5.2.6	4.865.682,00	35.250.454,00

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan BLUD SMK N 6 Batam
Provinsi Kepulauan Riau,

Ahmad Tahir, M.Ak.
Pembina Tk I / (IV b)
NIP 197504222005021003

III. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BLUD SMK N 6 BATAM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	**ASET**			
2	**ASET LANCAR**			
3	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
4	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
5	Kas di BLUD		4.865.673,00	35.247.511,00
6	Kas Dana BOS		-	-
7	Kas Dana P2SP		9,00	2.943,00
8	Kas Lainnya		-	6.600.643,00
9	Piutang Pajak		-	-
10	Penyisihan Piutang Pajak		-	-
11	Piutang Pajak Netto		-	-
12	Piutang Retribusi		-	-
13	Penyisihan Piutang Retribusi		-	-
14	Piutang Retribusi Netto		-	-
15	Belanja Dibayar Dimuka		-	-
16	Piutang Lainnya		-	-
17	Penyisihan Piutang Lainnya		-	-
18	Piutang Lainnya Netto		-	-
19	Persediaan		-	-
20	**Jumlah Aset Lancar**		**4.865.682,00**	**41,851,097.00**
21	**ASET TETAP**		**22,541,018,088.91**	**20,909,098,632.94**
22	Tanah		5.964.000.000,00	5.964.000.000,00
23	Peralatan dan Mesin		6,343,365,687.14	5.655.910.687,14
24	Gedung dan Bangunan		13.500.592.994,00	11.870.572.994,00
25	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		25.000.000,00	25.000.000,00
26	Aset Tetap Lainnya		2.685.822.135,00	2.129.705.135,00
27	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
28	Akumulasi Penyusutan		(5.977.762.727,23)	(4.936.090.183,20)
29	**Jumlah Aset Tetap**		**22,541,018,088.91**	**20.909.098.632,94**

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
30	**ASET LAINNYA**		**244,025,000.00**	**244,025,000.00**
31	Tagihan Jangka Panjang			
32	Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
33	Tuntutan Ganti Rugi		-	-
34	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
35	Aset Tak Berwujud		229.500.000,00	229.500.000,00
36	Aset Lain-Lain		14.525.000,00	14.525.000,00
37	Akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud		-	-
38	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		-	-
39	**Jumlah Aset Lainnya**		**244.025.000,00**	**244.025.000,00**
40	**JUMLAH ASET**		**22,789,908,770.91**	**21.194.974.729,94**
41	**KEWAJIBAN**			**6,600,643.00**
42	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**			**6,600,643.00**
43	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-	-
44	Pendapatan Diterima Dimuka		-	-
45	Utang Belanja		-	-
46	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
47	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek**		**-**	**6.600.643,00**
48	**JUMLAH KEWAJIBAN**		**-**	**-**
49	**EKUITAS**		**22,789,908,770.91**	**21.188.374.086,94**
50	**EKUITAS**		**22,789,908,770.91**	**21.188.374.086,94**
51	Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan		**22,789,908,770.91**	21.188.374.086,94
52	**JUMLAH EKUITAS**		**22,789,908,770.91**	**21.188.374.086,94**
53	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS**		**22,789,908,770.91**	**21.194.974.729,94**

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan BLUD SMK N 6 Batam
Provinsi Kepulauan Riau,

Ahmad Tahir, M.Ak.
Pembina Tk I / (IV b)
NIP 197504222005021003

IV. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BLUD SMK N 6 BATAM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	**PENDAPATAN**				
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	1.373.415.030,00	2.619.105.929,00	(1.245.690.899,00)	(90,70)
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Hibah	1.907.470.000,00	4.475.412.963,14	(2.567.942.963,14)	(134,63)
6	Pendapatan APBN/ APBD	4.543.670.000,00	3.908.360.000,00	635.310.000,00	13,98
7	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	193.251,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah PENDAPATAN	**7.824.748.281,00**	**11.002.878.892,14**	**(3.178.130.611,14)**	**(40,62)**
8	**BEBAN**				
9	Beban Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Beban Barang	3,458,908,778.00	2.647.381.959,80	811,526,818.20	23.46
11	Beban Jasa	1.396.044.561,00	5.507.740.026,00	(4.111.695.465,00)	-294,52
12	Beban Pemeliharaan	85.293.100,00	153.488.800,00	(68.195.700,00)	(79,95)
13	Beban Perjalanan Dinas	241.291.680,00	823.286.085,00	(581.994.405,00)	(241,20)
14	Beban Penyusutan Aset	1.041.672.544,03	1.213.288.790,20	(171.616.246,17)	(16,48)
15	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah BEBAN	**6,223,210,663.03**	**10.345.185.661,00**	**(4,121,974,997.97)**	**(66.24)**
	Surplus/Defisit Operasional	**1,601,537,617.97**	**657.693.231,14**	**943,844,386.83**	**58.93**
17	**KEGIATAN NON OPERASIONAL**				
18	Surplus/ Defisit Penjualan Aset Nonlancar	0,00	0,00	0,00	0,00
19	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Surplus/Defisit Dari KEGIATAN NON OPERASIONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Surplus/Defisit Sebelum POS LUAR BIASA	**1,601,537,617.97**	**657.693.231,14**	**943,844,386.83**	**58.93**
21	**POS LUAR BIASA**				
22	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
Z3	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah POS LUAR BIASA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Surplus/Defisit-LO	**1,601,537,617.97**	**657.693.231,14**	**943,844,386.83**	**58.93**

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan BLUD SMK N 6 Batam
Provinsi Kepulauan Riau,

Ahmad Tahir, M.Ak.
Pembina Tk I / (IV b)
NIP 197504222005021003

V. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BLUD SMK N 6 BATAM
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	**Arus Masuk Kas**		
3	Pendapatan APBD	4.543.670.000,00	3.908.360.000,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	1.373.415.030,00	2.619.105.929,00
5	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00
6	Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	0,00
7	Pendapatan Hibah	0,00	3.379.174.507,00
8	Pendapatan BLUD Lainnya	193.251,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	**5,917,278,281.00**	**9.906.640.436,00**
9	**Arus Keluar Kas**		
10	Pembayaran Pegawai	0,00	0,00
11	Pembayaran Barang dan Jasa	4.423.243.339,00	6.948.412.870,80
12	Pembayaran Pemeliharaan	85.793.100,00	1.491.103.000,00
13	Pembayaran Perjalanan Dinas	241.291.680,00	445.000.000,00
14	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	**4,750,328,119.00**	**8.884.515.870,80**
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi	**1,166,950,162.00**	**1.022.124.565,20**
15	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
16	**Arus Masuk Kas**		
17	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
18	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
19	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
20	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
21	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
22	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
23	Penerimaan dari Divestasi	0,00	0,00
24	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	**0,00**	**0,00**
25	**Arus Keluar Kas**		
26	Perolehan Tanah	0,00	0,00
27	Perolehan Peralatan dan Mesin	641.215.000,00	1.044.753.000,00

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
28	Perolehan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
29	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
30	Perolehan Aset Tetap Lainnya	556.117.000,00	386.985.000,00
31	Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
32	Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00
33	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	**1,197,332,000.00**	**1.431.738.000,00**
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi	**(1,197,332,000.00)**	**(1.431.738.000,00)**
34	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**		
35	**Arus Masuk Kas**		
36	Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00
37	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	**0,00**	**0,00**
38	**Arus Keluar Kas**		
39	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00
40	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00
41	Penyetoran ke Kas Negara	2.934,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	**2.934,00**	**0,00**
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	**(2.934,00)**	**0,00**
42	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**		
43	**Arus Masuk Kas**		
44	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	**0,00**	**0,00**
45	**Arus Keluar Kas**		
46	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	6.600.643,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	**6.600.643,00**	**0,00**
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	**(6.600.643,00)**	**0,00**
47	**Kenaikan/ Penurunan Kas BLU**	**(36.985.414,00)**	**(409.613.434,80)**
48	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLU**	**41.851.097,00**	**451.464.531,80**
49	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU**	**4.865.682,00**	**41.851.097,00**

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan BLUD SMK N 6 Batam
Provinsi Kepulauan Riau,

Ahmad Tahir, M.Ak.
Pembina Tk I / (IV b)
NIP 197504222005021003

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BLUD SMK N 6 BATAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Ekuitas Awal		21.188.374.086,94	20.530.680.855,80
2	Surplus/Defisit-LO		1,601,537,617.97	657.693.231,14
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		(2.934,00)	0,00
4	Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
6	Lain-lain		(2.934,00)	0,00
7	Ekuitas Akhir		**22,789,908,770.91**	**21.188.374.086,94**

Batam, 25 Mei 2026
Pimpinan BLUD SMK N 6 Batam
Provinsi Kepulauan Riau,

Ahmad Tahir, M.Ak.
Pembina Tk I / (IV b)
NIP 197504222005021003

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Laporan Keuangan BLUD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan BLUD.
Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala BLUD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan BLUD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SMK Negeri 6 Batam Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan RiauTahun 2024.
17. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 tahun 2022 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah.

18. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 6 Batam Tahun 2025, adalah tanggungjawab sepenuhnya BLUD SMK Negeri 6 Batam, dalam hal ini adalah Pimpinan BLUD SMK Negeri 6 Batam.

1.4 Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 6 Batam tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 6 Batam tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (*Subsequent Event*) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 6 Batam tahun 2025. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2025.

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 6 Batam adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 6 Batam
- 1.4 Periode Pelaporan Keuangan
- 1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Profil BLUD SMK Negeri 6 Batam
- 2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 6 Batam
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 6 Batam
- 2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 6 Batam tahun 2025

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Asumsi dasar Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- 4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja
- 4.7 Kebijakan Akuntansi Kas
- 4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban
Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
5.1 Laporan Realisasi Anggaran
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3 Neraca
5.4 Laporan Operasional
5.5 Laporan Arus Kas
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
5.7 Catatan Atas Laporan Keuangan
Bab VI Penjelasan atas informasi – Informasi non Keuangan
6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan
Bab VII Penutup

BAB II

PROFIL BLUD SMK NEGERI 6 BATAM

2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 6 Batam

BLUD SMK Negeri 6 Batam memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten serta tenaga ahli yang mendukung pelaksanaan *Teaching Factory (TEFA)*. SDM yang tersedia meliputi:

1. Tenaga Pendidik (Guru Produktif dan Normatif):
   - Guru bersertifikasi keahlian industri sesuai bidang kompetensi.
   - Guru mata pelajaran umum yang mendukung kurikulum berbasis kompetensi.
   - Instruktur dari dunia industri yang terlibat dalam program pelatihan siswa.
2. Tenaga Kependidikan:
   - Staf administrasi yang mengelola keuangan dan operasional BLUD.
   - Teknisi laboratorium dan bengkel untuk mendukung kegiatan praktik.
   - Tenaga keamanan dan kebersihan untuk menjaga lingkungan sekolah yang kondusif.
3. Kemitraan dengan Industri:
   - Mengundang praktisi industri sebagai instruktur tamu.
   - Menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk program magang dan penyerapan tenaga kerja.
   - Mengembangkan skema sertifikasi kompetensi yang diakui dunia usaha dan industri.

Sebagai SMK BLUD yang berbasis *Teaching Factory* (TEFA), sekolah telah memiliki berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran berbasis produksi dan layanan industri, di antaranya:

1. Ruang Kelas dan Laboratorium:
   - Ruang kelas berbasis IT untuk pembelajaran teori.
   - Laboratorium komputer untuk simulasi bisnis digital dan desain grafis.
   - Perpustakaan digital sebagai pusat referensi dan literasi siswa.
2. Workshop dan Bengkel TEFA:
   - Bengkel otomotif dengan peralatan servis kendaraan standar industri.
   - Workshop Teknik Pemesinan yang di dukung dengan peralatan yang berstandar industri.
3. Fasilitas Pendukung:
   - Tempat tinggal bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
   - Ruang pemasaran produk hasil Teaching Factory.
   - Area publik seperti Lapangan Futsal yang digunakan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa.

Sebagai BLUD, SMK memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan Teaching Factory. Sumber dana sekolah berasal dari:

1. Dana BOS dan APBD:
   - Digunakan untuk operasional sekolah, gaji guru, serta pengadaan bahan ajar dan alat praktik.
2. Pendapatan dari Unit Usaha TEFA:
   - Hasil penjualan produk dari unit Teaching Factory.
   - Jasa layanan seperti servis otomotif dan pembuatan sparepart kebutuhan proses produksi di industri.
   - Kerjasama dengan industri dalam proyek tertentu.
3. Bantuan dari Pemerintah dan Swasta:
   - Hibah atau bantuan dari pemerintah untuk pengembangan kurikulum dan fasilitas.
   - Sponsor dari perusahaan yang mendukung pengembangan Teaching Factory.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 6 Batam

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan Kepulauan Riau tahun 2021-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan di Kabupaten/Kota, berkaitan dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran- sasaran yang menjadi penjabaran visi dan misi pembangunan di Kepulauan Riau. Telaah terhadap sasaran-sasaran yang dimaksud telah dirumuskan pada naskah RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026, menunjukkan adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan. Kebutuhan tersebut mencakup sarana dan prasarana pendidikan,pendidik dan tenaga kependidikan, pendanaan, dan tata kelola.

Ketiga sasaran dalam Rencana Strategi Dinas Pendidikan tersebut adalah Meningkatnya mutu pendidikan, Meningkatnya akses layanan pendidikan dan Meningkatnya kualitas layanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan tujuan Meningkatkan akses dan mutu pendidikan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka dirumuskan strategi dan kebijakan, yaitu :

a. Strategi
   1. Peningkatan mutu sekolah melalui peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
   2. Peningkatan akreditasi sekolah dalam pemenuhan standar nasional pendidikan.
   3. Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan Pendidikan yang bermuatan lokal dan sinkron dengan kebutuhan industri.
   4. Meningkatkan kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan, efisien, dan efektif.
   5. Mengembangun layanan Pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan merata.
   6. Meningkatkan kualitas pelayanan dinas pendidikan dengan penerapan standar pelayanan publik.

b. Kebijakan
   1. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan, efisien, dan efektif
   2. Peningkatan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran
   3. Akselerasi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
   4. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dayatampung pendidikan
   5. Mengembangun layanan pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan merata,
   6. Mendorong keberlanjutan sekolah dari dasar hingga perguruan tinggi
   7. Penyediaan sarana dan prasarana kantor
   8. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur pelayanan

Berdasarkan uraian diatas, tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan maka startegi dan arah kebijakan SMK Negeri 6 Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Strategi
   a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan;
   b. Meningkatkan kuantitas tamatan yang mempunyai daya saing diDU/DI;
   c. Meningkatkan kompetensi keahlian siswa yang mampu menjadi tenagakerja trampil siap kerja, berwirausaha, ataupun melanjutkan ke jenjang yanglebih tinggi;
   d. Meningkatkan potensi sekolah yang bernuansa industri melalui Teaching Factory pada semua kompetensi keahlian sebagai sarana pembelajaran berbasis produk (barang/jasa) untuk menghasilkan tamatan yang kompeten sesuai kebutuhan industri;
   e. Meningkatkan fungsi sekolah sebagai Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kejuruan Terpadu (PPKT) kepada masyarakat;
   f. Meningkatkan fungsi sekolah sebagai Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kejuruan Terpadu (PPKT) kepada masyarakat;
   g. Meningkatkan Kualitas Lingkungan yang aman, nyaman, indah dan kondusif.
2. Kebijakan
   a. Meningkatkan jumlah Kompetensi keahlian sebagai upaya penyediaantenaga kerja;
   b. Meningkatkan jumlah ruang pembelajaran umum sebagai upaya penambahan kompetensi keahlian;
   c. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik untuk menghasilkan tamatan yang kompeten;
   d. Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan sebagai upaya pelayananpadatenaga pendidik dan siswa;
   e. Meningktakan keterserapan tamatan di DU/DI;
   f. Meningkatkan kompetensi keahlian siswa melalui uji LSP;
   g. Meningkatkan Jumlah siswa yang berwirausaha;
   h. Meningkatkan kompetensi siswa untuk melanjutkan ke jenjang yanglebihtinggi melalui pendampingan BK;

i. Meningkatkan Jumlah kompetensi keahlian yang pembelajaran berwirausaha melalui teaching factory;
j. Meningkatkan Jumlah fasilitas ruang pelatihan yg dimanfaatkan oleh masyarakat.
k. Meningkatkan Jumlah kegiatan pelatihan bagi masyarakat
l. Meningkatkan Luasan ruang terbuka hijau

2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 6 Batam

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan BLUD SMK Negeri 6 Batam

No	Unit Teaching Factory (TEFA)	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Keterangan
1	**TEFA Mesin**	Jig & Ficture	434.329.188,38	412.024.509	94.8%	Suku cadang tersedia, namun ada keterlambatan pengiriman
		Repair/Modification Part	364.276.093,48	343.353.757,5	94.2%	Biaya produksi sedikit lebih rendah dari perkiraan
		Improvement Part	294.222.998,58	274.683.006	93.3%	Harga bahan baku mengalami kenaikan
		Research & Development	154.116.808,78	137.341.503	89.1%	Pengadaan alat praktek sesuai rencana
		Support Product	126.095.570,82	178.543.953,9	141%	Sudah memenuhi ekspektasi
		Disegn Mechanical Engineering	28.021.237,96	27.468.300,6	98%	Realisasi menurun karena beberapa proyek belum selesai

BAB III
INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja pada BLUD SMK, pada laporan keuangan ini digunakan sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat managemen yang digunakan untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran dan tujuan, untuk mewujudkan misi dan visi organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut akan disajikan data kinerja BLUD SMK Negeri 6 Batam Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target BLUD SMK Negeri 6 Batam Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
A. Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa					
1	Persentase kelulusan siswa	100%	100%	100%	Mencapai target
2	Rata-rata nilai Ujian Kompetensi Keahlian (UKK)	> 84	84	100%	Mencapai target
3	Persentase siswa yang memperoleh sertifikasi kompetensi industri	100%	100%	100%	Mencapai target
4	Persentase lulusan yang bekerja sesuai kompetensi dalam 6 bulan	41,7%	75%	55.6%	Hampir mencapai target, strategi peluang kerja perlu ditingkatkan
5	Persentase lulusan yang berwirausaha	10%	4.2%	42%	Kurang mencapai target, strategi program wirausaha perlu ditingkatkan
B. Kinerja Keuangan dan Unit Usaha BLUD					
6	Persentase pendapatan unit usaha BLUD terhadap biaya operasional sekolah	25%	25%	100%	Hampir mencapai target, strategi pemasaran perlu ditingkatkan
7	Efisiensi penggunaan dana BLUD sesuai rencana kerja	100%	100%	100%	Anggaran terserap dengan baik dan efektif
C. Kinerja Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)					
8	Jumlah kerja sama aktif dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	9 mitra	9 mitra	100%	Mencapai target
9	Persentase siswa yang menjalani magang industri	100%	100%	100%	Semua siswa telah menjalani magang
10	Jumlah produk atau jasa unggulan dari Teaching Factory (TEFA)	6 produk	6 produk	100%	Mencapai target
D. Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan					

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
11	Kepuasan siswa dan orang tua terhadap layanan pendidikan	85%	89%	105%	Melebihi target berdasarkan survei internal
12	Jumlah guru produktif bersertifikasi industri	75%	70%	93%	Hampir mencapai target, ada guru dalam proses sertifikasi

Berdasarkan tabel pencapaian, secara keseluruhan SMK BLUD telah mencapai rata-rata 91.3% dari target yang ditetapkan. Beberapa indikator bahkan melebihi target, seperti rata-rata nilai UKK dan kepuasan siswa. Namun, ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, seperti lulusan yang bekerja sesuai kompetensi, lulusan yang berwirausaha dan pencapaian sertifikasi industri pada guru produktif. Untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memperkuat kemitraan dengan industri untuk meningkatkan jumlah lulusan yang bekerja sesuai kompetensi.
2. Memperkuat strategi program kewirausahaan untuk meningkatkan jumlah presentase lulusan yang berwirausaha.
3. Meningkatkan kompetensi sertifikasi industri agar guru produktif mengembangkan kualitas sesuai dengan standar dunia industri.

Dengan perbaikan strategi ini diharapkan SMK BLUD dapat mencapai 100% target di tahun mendatang.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Adapun hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target realisasi antara lain :

b. Hambatan dalam Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa

1. Penyerapan lulusan ke dunia kerja belum optimal
   - Persaingan ketat di dunia kerja sehingga tidak semua lulusan langsung terserap.
   - Kurangnya pengalaman praktis yang relevan dengan kebutuhan industri.
   - Masih ada lulusan yang lebih memilih bekerja di luar bidang keahlian mereka.
2. Penyerapan lulusan berwirausaha
   - Kurangnya pengalaman praktis yang relevan dengan dalam dunia berwirausaha
   - Kurangnya modal dalam membentuk dan membangun usaha
   - Kurangnya kesiapan mental, strategi dan manajemen lulusan dalam berwirausaha.

b. Hambatan dalam Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan.

1. Kurangnya jumlah guru bersertifikasi industri
   - Tidak semua guru memiliki kesempatan mengikuti pelatihan atau sertifikasi karena keterbatasan waktu dan biaya.
   - Masih ada kendala administratif dalam proses pengajuan sertifikasi guru ke lembaga industri terkait.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Akuntansi adalah BLUD SMK Negeri 6 Batam Provinsi Kepulauan Riau.

4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas;
b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 6 Batam Provinsi Kepulauan Riau adalah:

a) ***Basis Kas*** untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam ***Laporan Realisasi Anggaran***
Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat Kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

b) ***Basis akrual*** untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam ***Neraca***
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

c) ***Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran*** berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riautidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

d) ***Basis akrual untuk neraca*** berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas;

4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengakuan dan pengukuran atas transaksi kejadian ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan ini adalah:

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.
Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut.

Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD , adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 6 Batam tahun 2024, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat Diterima pada Rekening Kas Umum. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum untuk seluruh transaksi setelah dilakukan pengesahan definitif bendahara. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

4.7 Kebijakan Akuntansi Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas secara umum diakui jika memenuhi kriteria:

a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.

4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari:

- Barang Konsumsi;
- Bahan untuk pemeliharaan;
- Suku cadang;
- Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
- Bahan baku;
- Barang dalam proses/setengah jadi;

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal; diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.

4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.

4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

BAB V RINCIAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang telah disusun BLUD SMK Negeri 6 Batam periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini:

5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan – LRA

Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 6 Batam mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp5,917,278,281.00 atau sebesar 75.36% dari target yang ditetapkan sebesar Rp7.852.395.149,00 sebagaimana ikhtisar sebagai berikut:

Tabel 5.1.1 Pendapatan - LRA

Uraian	Anggaran (Rp) 2025	Realisasi (Rp) 2025	%	Realisasi 2024
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.401.061.898,00	1.373.415.030,00	98,03	2.619.105.929,00
Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat	1.907.470.000,00	-	-	1.013.800.000,00
Pendapatan BLUD dari Hibah Tidak Terikat	-	-	-	2.365.374.507,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	-	-	-	-
DAK Non Fisik-BOS Reguler	4.543.670.000,00	4.543.670.000,00	100	3.908.360.000,00
Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	193.251,00	193.251,00	100	-
Total Pendapatan BLUD	7.852.395.149,00	5,917,278,281.00	75.36	**9.906.640.436,00**

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Tahun 2025 sebesar Rp1.373.415.030,00 atau 98,03% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp1.401.061.898,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

Uraian	Anggaran (Rp) 2025	Realisasi (Rp) 2025	%	Realisasi (Rp) 2024
Pendapatan TEFA Teknik Pemesinan	1.401.061.898,00	1.373.415.030,00	98,03	2.600.623.230,00
Pendapatan TEFA Teknik Kendaraan Ringan dan Otomotif	-	-	-	18.482.700,00

Uraian	Anggaran (Rp) 2025	Realisasi (Rp) 2025	%	Realisasi (Rp) 2024
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.401.061.898,00	1.373.415.030,00	98,03	**2.619.105.930,00**

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.3 Pendapatan BLUD dari Hibah

Uraian	Anggaran (Rp) 2025	Realisasi (Rp) 2025	%	Realisasi (Rp) 2024
Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat	-	-	-	-
Pendapatan BLUD dari Hibah Tidak Terikat	-	-	-	-
Total Pendapatan BLUD dari Hibah	-	-	-	-

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.4 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

Uraian	Anggaran (Rp) 2025	Realisasi (Rp) 2025	%	Realisasi (Rp) 2024
-	-	-	-	-
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	-	-	-	-

iv) Pendapatan BLUD dari APBD

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD Tahun 2025 sebesar Rp4.543.670.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp4.543.670.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.5 Pendapatan BLUD dari APBD

Uraian	Anggaran (Rp) 2025	Realisasi (Rp) 2025	%	Realisasi (Rp) 2024
DAK Non Fisik-BOS Reguler	4.543.670.000,00	4.543.670.000,00	100	3.908.360.000,00
Total Pendapatan BLUD dari APBD	**4.543.670.000,00**	**4.543.670.000,00**	**100**	**3.908.360.000,00**

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp193.251,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp193.251,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.6 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

Uraian	Anggaran (Rp) 2025	Realisasi (Rp) 2025	%	Realisasi (Rp) 2024
Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	193.251,00	193.251,00	100	-
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	193.251,00	193.251,00	100	-

b. Belanja

1. Belanja Pegawai BLUD

Berupa Belanja Gaji & Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan BLUD dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00 % dari total anggaran belanja pegawai BLUD yang sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.7 Belanja Pegawai BLUD

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	%
-	-	-	-
Total Belanja Pegawai BLUD	-	-	-

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp4.750.328.119,00 atau 99,00% dari total anggaran belanja barang dan jasa yang sebesar Rp4.900.040.660,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.8 Belanja Barang dan Jasa BLUD

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	%
Belanja Barang	3.172.456.767,00	3.027.698.778,00	95,4
Belanja Jasa	1.397.972.759,00	1.396.044.561,00	100
Belanja Pemeliharaan	86.190.454,00	85.293.100,00	99
Belanja Perjalanan Dinas	243.420.680,00	241.291.680,00	99
Total Belanja Barang dan Jasa BLUD	**4.900.040.660,00**	**4,750,328,119.00**	**96,9**

3. Belanja Modal BLUD

Belanja modal BLUD terdiri dari belanja peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp641,215,000.00atau 80,01% dari total anggaran belanja modal peralatan dan mesin yang sebesar Rp801.465.000,00. Belanja gedung dan bangunan yang berealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total anggaran belanja modal belanja gedung dan bangunan

yang sebesar Rp1.630.020.000,00. Belanja aset tetap lainnya yang terealisasi sebesar Rp556.117.000,00 atau 100,00% dari total anggaran belanja aset tetap lainnya yang sebesar Rp556.117.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1 Belanja Modal BLUD

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	801.465.000,00	641,215,000.00	80	1.044.753.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan	1.630.020.000,00	0,00	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	556.117.000,00	556.117.000,00	100	386.985.000,00
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
Total Belanja Modal BLUD	**2.987.602.000,00**	**1,197,332,000.00**	**40**	**1.431.738.000,00**

5.2 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo awal SAL pada tahun 2025 sebesar Rp35.250.454,00 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

2) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan digunakan dalam rangka membiayai defisit tahun anggaran berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp35.250.454,00 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

3) Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SiLPA tahun 2025 sebesar Rp4.865.682,00.

5.3 Neraca

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- Berupa kas/setara kas dan persediaan.

Aset Lancar sebesar Rp4.865.682,00 yang dimiliki BLUD SMK Negeri 6 Batam per 31 Desember 2025. Adapun rincian Aset Lancar terdiri dari:

a. Kas di Bendahara BLUD

Kas BLUD adalah semua bentuk penerimaan dan pengeluaran uang tunai atau setara kas yang dikelola oleh SMK Negeri 6 Batam dalam rangka menjalankan operasionalnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, dan pendapatan lainnya. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp4.865.673,00 dengan rincian :

Tabel 5.3.1 Kas di Bendahara BLUD

Uraian	Jumlah
Kas di Bank	
Rek Bank BRK Syariah No Rek. 186-20-01640	50.000,00
Rek Bank BRK Syariah No Rek. 186-43-01444	4.815.673,00
Kas Tunai	
Total Kas di Bendahara BLUD	4.865.673,00

b. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan kas dibawah pengelolaan bendahara BOS yang bersumber dari pemerintah untuk mendukung operasional sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan tanpa membebani peserta didik. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp0,00 dengan rincian :

Tabel 5.3.2 Kas di Bendahara BOS

Uraian	Jumlah
Kas di Bank	-
Rek Bank BRK Syariah No Rek. 186-38-26153	-
Kas Tunai	-
Total Kas di Bendahara BOS	-

c. Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan kas yang berasal dari sumber-sumber lain. Kas Lainnya pada BLUD SMK Negeri 6 Batam berasal dari sisa dana dari Pendanaan Pendidikan Tahun 2024 sebesar Rp2.943. Pada tahun 2025 pada tanggal 14 Januari 2025 disetor uang sebesar Rp2.934 ke Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga Kas Lainnya tersisa Rp9,00 dan disetor pada tanggal 22 Januari 2026 ke Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

d. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 terdiri dari:

Tabel 5.3.3 Kas di Bendahara BLUD

Uraian	Jumlah
Persediaan Barang Habis Pakai	-
- Bahan	-
- Suku Cadang	-
Total Persediaan	-

2. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh pelayanan umum. Aset tetap sebesar Rp22.855.028.088,91 per 31 Desember 2025 merupakan nilai perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan yang pengadaannya bersumber dari pengelolaan dana BOSP dan dana BLUD.

a. Tanah

Nilai aset tanah BLUD SMK Negeri 6 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.964.000.000,00 dan tidak terdapat penambahan aset tetap tanah selama tahun 2025.

b. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin BLUD SMK Negeri 6 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp6,343,365,687.14 meningkat sebesar Rp487.455.000,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp5.855.910.687,14. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.4 Peralatan dan Mesin

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**5.855.910.687,14**
Penambahan :	
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	466.455.000,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	-
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
- Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kementerian	21.000.000
Total Penambahan	**487.455.000,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	-
Reklasifikasi ke Aset Tetap	-
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	-
Total Pengurangan :	-
Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**6,343,365,687.14**

c. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan BLUD SMK Negeri 6 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.500.592.994,00 meningkat sebesar Rp1.630.020.000,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp11.870.572.994,00. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.5 Gedung dan Bangunan

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**11.870.572.994,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	-
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
- Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kementerian	1.630.020.000,00
Total Penambahan	**1.630.020.000,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	-
Reklasifikasi ke Aset Tetap	-
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	-
Total Pengurangan :	
Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**13.500.592.994,00**

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD SMK Negeri SMK Negeri 6 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp25.000.000,00 dan tidak terdapat penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2025.

e. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya BLUD SMK Negeri 6 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.685.822.135,00 meningkat sebesar Rp556.117.000,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp 2.129.705.135,00. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.6 Aset Tetap Lainnya

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	**Rp2.129.705.135,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp556.117.000,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	-
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
- Hibah Aset Tetap Lainnya dari Kementerian	-

Total Penambahan	**Rp556.117.000,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Lainnya	-
Reklasifikasi ke Aset Tetap	-
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	-
Total Pengurangan :	-
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya	**Rp2.685.822.135,00**

3. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya dapat berupa Aset Tidak Berwujud dan Aset Rusak Berat/Tidak Digunakan Lagi dalam Operasional Kegiatan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 6 Batam mencatat Aset Lainnya sebesar Rp244.025.000,00 terdiri dari Aset Tidak Berwujud sebesar Rp229.500.000,00 dan Aset Lain-Lain sebesar Rp 14.525.000,00. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.7 Aset Lainnya

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Lainnya	**244.025.000,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Lainnya	-
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	-
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
- Hibah Aset Lainnya dari Kementerian	-
Total Penambahan	-
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Lainnya	-
Reklasifikasi ke Aset Tetap	-
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	-
Total Pengurangan :	-
Saldo Akhir Aset Lainnya	**244.025.000,00**

4. Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 6 Batam tidak memiliki kewajiban.

5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD SMK Negeri 6 Batam pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pada Tahun 2025 Ekuitas adalah sebesar Rp23.103.918.770,91.

Tabel 5.3.7 Ekuitas

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Ekuitas	**Rp 21.188.374.086,94**
- Surplus/Defisit LO	Rp 1.915.547.617,97
- Koreksi Ekuitas	(Rp 2.934,00)
Saldo Ekuitas Akhir	**Rp 23.103.918.770,91**

5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional
b) Beban dari kegiatan operasional
c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
d) Pos luar biasa
e) Surplus/defisit LO

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional

Pendapatan LO dari kegiatan operasional terdiri dari :

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2025 sebesar Rp1.373.415.030,00 lebih rendah dari Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.1 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan TEFA Teknik Pemesinan	1.373.415.030,00	2.600.623.230,00	-47,19	-1.227.208.200,00
Pendapatan TEFA Teknik Kendaraan Ringan dan Otomotif	-	18.482.700,00	-100,00	-18.482.700,00
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO	**1.373.415.030,00**	**2.619.105.930,00**	-47,56	**-1.245.690.900,00**

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2025 sebesar Rp1.907.470.000,00 lebih rendah dari pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2024 sebesar Rp3.379.174.507,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.2 Pendapatan BLUD dari Hibah LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat	1.907.470.000,00	1.013.800.000,00	88,15	**893.670.000,00**
Pendapatan BLUD dari Hibah Tidak Terikat	-	2.365.374.507,00	-100,00	**-2.365.374.507,00**
Total Pendapatan BLUD dari Hibah LO	**1.907.470.000,00**	**3.379.174.507,00**	-43,55	**- 1.471.704.507,00**

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO Tahun 2025 sebesar Rp0,00.

Tabel 5.4.3 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
-	-	-	-	-
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO	-	-	-	-

iv) Pendapatan BLUD dari APBD LO

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD LO Tahun 2025 sebesar Rp4.543.670.000,00 lebih tinggi dari pendapatan BLUD dari APBD LO sebesar Rp3.908.360.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.4 Pendapatan BLUD dari APBD LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
DAK Non Fisik-BOS Reguler	4.443.670.000,00	3.908.360.000,00	13,70	535.310.000,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	100.000.000,00	-	100,00	100.000.000,00
Total Pendapatan BLUD dari APBD LO	**4.543.670.000,00**	**3.908.360.000,00**	16,26	**635.310.000,00**

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO

Realisasi dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2025 sebesar Rp193.251,00 lebih tinggi dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.5 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Jasa Giro	193.251,00	-	100	193.251,00
Total Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO	193.251,00	-	100	193.251,00

b) Beban dari kegiatan operasional

1. Belanja Pegawai BLUD LO

Berupa Beban Gaji & Tunjangan dan Beban Tambahan Penghasilan BLUD LO dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp0,00 lebih tinggi/rendah dari beban pegawai BLUD LO tahun 2024 yang sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.6 Belanja Pegawai BLUD LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
-	-	-	-	-
Total Beban Pegawai BLUD	-	-	-	-

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Beban barang dan jasa LO tahun 2025 terealisasi sebesar Rp5.909.200.663,03 lebih rendah dari dari Beban barang dan jasa LO tahun 2024 yang sebesar Rp10.345.185.661,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.7 Belanja Barang dan Jasa BLUD

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan
Beban Pegawai	-	-	-	-
Beban Barang	3.144.898.778,00	2.647.381.959,80	15,82	497.516.818,20
Beban Jasa	1.396.044.561,00	5.507.740.026,00	-294,52	-4.111.695.465,00
Beban Pemeliharaan	85.293.100,00	153.488.800,00	-79,95	-68.195.700,00
Beban Perjalanan Dinas	241.291.680,00	823.286.085,00	-241,20	-581.994.405,00
Beban Penyusutan Aset	1.041.672.544,03	1.213.288.790,20	-16,48	-171.616.246,17
Beban Bunga	-	-	-	-
Total Beban Barang dan Jasa BLUD	**5.909.200.663,03**	**10.345.185.661,00**	-75,07	-4.435.984.997,97

c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan dikelompokkan dalam kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional BLUD SMK Negeri 6 Batam tahun 2025 sebesar Rp0,00.

d) Surplus/defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan beban. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 6 Batam mencatat surplus LO sebesar Rp1.915.547.617,97.

5.5 Laporan Arus Kas

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi BLUD SMK Negeri 6 Batam dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi BLUD SMK Negeri 6 Batam pada Tahun 2025 sebesar Rp5,917,278,281.00 yang terdiri dari:

Tabel 5.5.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan APBD	4.543.670.000,00	3.908.360.000,00
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	1.373.415.030,00	2.619.105.929,00
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	-	-
Pendapatan Hasil Kerja Sama	-	-
Pendapatan Hibah	0,00	3.379.174.507,00
Pendapatan BLUD Lainnya	193.251,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	**5,917,278,281.00**	**9.906.640.436,00**

b. Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi BLUD SMK Negeri 6 Batam selama Tahun 2025 sebesar Rp4,750,328,119.00 terdiri dari:

Tabel 5.5.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pembayaran Pegawai	-	-
Pembayaran Barang dan Jasa	4.423.243.339,00	6.948.412.870,80
Pembayaran Pemeliharaan	85,793,100.00	1.491.103.000,00
Pembayaran Perjalanan Dinas	241.291.680,00	445.000.000,00
Pembayaran Bunga	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	**4,750,328,119.00**	**8.884.515.870,80**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp1,166,950,162.00. Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

Tabel 5.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1,166,950,162.00	1.022.124.565,20

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset Non-Keuangan lainnya.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan di masa yang akan datang.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 6 Batam pada Tahun 2025 sebesar Rp0,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.5.4 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan Aset Tetap Tanah	-	-
Penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	-	-
Penjualan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	-	-
Penjualan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-
Penjualan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	-	-

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 6 Batam pada Tahun 2025 sebesar Rp2.987.602.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.5.5 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Perolehan Tanah	-	-
Perolehan Peralatan dan Mesin	641,215,000.00	1.044.753.000,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	-	-
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya	556.117.000,00	386.985.000,00
Perolehan Aset Lainnya	-	-
Pengeluaran Penyertaan Modal	-	-
Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	1,197,332,000.00	1.431.738.000,00

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp-2.987.602.000,00 Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

Tabel 5.5.6 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1,197,332,000.00)	(1,431,738,000.00)

3) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang dan pinjaman.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktiviatas Pendanaan BLUD SMK Negeri 6 Batam pada Tahun 2025 sebesar Rp0,00.

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan BLUD SMK Negeri 6 Batam pada Tahun 2025 sebesar Rp2.934,00. Yang berasal dari Sisa Dana dari Pendanaan Pendidikan Tahun 2024 sebesar Rp2.943,00. Pada tanggal 14 Januari 2025 sudah disetor ke Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp2.934,00 dan sisa Rp9,00 sudah disetor pada tanggal 22 Januari 2026 ke Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp2.934,00. Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 dan 2024 adalah:

Tabel 5.5.7 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	- 2.934,00.	0,00

4) Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktiviatas Transitoris BLUD SMK Negeri 6 Batam pada Tahun 2025 sebesar Rp0,00.

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris BLUD SMK Negeri 6 Batam pada Tahun 2025 sebesar Rp6.600.643,00. Yang berasal dari Utang Pajak Tahun 2024 dan sudah dibayar pada tanggal 31 Januari 2025. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp6.600.643,00. Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024 adalah:

Tabel 5.5.8 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	- 6.600.643,00.	0,00

5) Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Periode 2025

Kenaikan Kas Bersih Selama Periode Tahun 2025 merupakan akumulasi jumlah kenaikan kas bersih dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris.

Selama Tahun Anggaran 2025 terjadi kenaikan kas bersih sebesar Rp372.628.019,80 yang terdiri dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2,957,220,162.00, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp-2,987,602,000,00, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp2.934,00 dan Arus Kas Aktivitas Transitoris sebesar Rp-6.600.643,00. Perbandingan Kenaikan /(Penurunan) Kas Bersih tahun 2025 dan 2024 adalah:

Tabel 5.5.9 Kenaikan / (Penurunan) Kas Bersih

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	-36.985.415,00	- 409.613.434,80

6) Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025

Saldo akhir kas per 31 Desember 2025 merupakan perhitungan Saldo Awal per 1 Januari 2025 ditambah (dikurangi) dengan kenaikan/ (penurunan) kas bersih selama periode tahun 2025.

Saldo akhir kas di BLUD SMK Negeri 6 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.865.682,00 didapat dari perhitungan saldo awal Tahun 2025 sebesar Rp 41.851.097,00 ditambah penurunan kas bersih selama periode tahun 2025 sebesar Rp-36.985.415,00.

Total Saldo Kas BLUD SMK Negeri 6 Batam Per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.865.682,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.10 Saldo Kas BLUD

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas di BLUD	4.865.673,00	35.247.511,00
Kas Dana BOS	-	-
Kas Lainnya	9,00	2.943,00
Saldo Akhir Kas	4.865.682,00	35.250.454,00

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

a) Ekuitas awal
b) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti:
   1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
   2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas Akhir

a) Ekuitas Awal

Pada Tahun 2025 BLUD SMK Negeri 6 Batam mencatat ekuitas awal sebesar Rp21.188.374.086,94 yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada laporan Tahun 2025. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.6.1 Ekuitas Awal

-	Jumlah Aset Tahun 2025	Rp21.194.974.729,94
-	Jumlah Kewajiban Tahun 2025	Rp 6.600.643,00
-	Saldo Awal Ekuitas 2025	Rp21.188.374.086,94

b) Surplus/Defisit LO

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dalam Laporan Operasional Tahun 2025 tercatat sebesar Rp1,601,537,617.97.

c) Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar Rp22,789,908,770.91merupakan saldo kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Total Aset dan Total Kewajiban BLUD SMK Negeri 6 Batam Tahun 2025.

Tabel 5.6.2 Ekuitas Akhir

-	Jumlah Aset Tahun 2025	Rp22,789,908,770.91
-	Jumlah Kewajiban Tahun 2025	Rp -
-	Saldo Awal Ekuitas 2025	Rp22,789,908,770.91

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

BLUD SMK Negeri 6 Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021.

BLUD SMK Negeri 6 Batam beralamat di Kawasan Industri Kabil Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa

6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

BLUD SMK Negeri 6 Batam adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nirlaba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra BLUD SMK Negeri 6 Batam, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala BLUD SMK Negeri 6 Batam.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 6 Batam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 disusun sebagai bentuk tanggung jawab BLUD SMK Negeri 6 Batam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, penyusunan laporan keuangan BLUD juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Secara umum pencapaian kinerja atas sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik, namun begitu masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang masih harus terus dibenahi dan menjadi perhatian oleh BLUD SMK Negeri 6 Batam.

Dengan memperhatikan strategisnya peran sekolah dan besarnya tantangan yang dihadapi untuk mendukung Visi Misi Pendidikan Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, SMK Negeri 6 Batam Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja serta memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan industri. Melalui pendekatan berbasis kompetensi, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta pengelolaan keuangan yang transparan melalui sistem BLUD, sekolah ini berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan lulusan SMK dapat menjadi tenaga kerja yang unggul dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Akhir kata, BLUD SMK Negeri 6 Batam Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan dalam penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban kami dalam menyajikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

Batam, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 6 BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Ahmad Tahir, M.Ak.
Pembina Tk I / (IV b)
NIP 197504222005021003

LAPORAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SMK NEGERI 7 BATAM
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

BLUD

Badan Layanan Umum Daerah

SMK Negeri 7 Batam

PERUM SEKAWAN PEMKO
KELURAHAN BELIAN KECAMATAN BATAM KOTA
KOTA BATAM
NPSN 69774885 NSS 401316012001
Telp. (0778) 4805790, Web : smknegeri7batam.sch.id
Email:smknegeri7batam@gmail.com. Kode Pos: 29463

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. BLUD SMK Negeri 7 Batam adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 7 Batam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kami berharap dengan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) di Provinsi Kepulauan Riau.

Batam, 26 Mei 2026

PIMPINAN BLUD SMKN 7 BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nursya'bani, M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700101 [illegible]1997032006

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan SMKN 7 Batam Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (iii) Neraca; (iv) Laporan Operasional (LO); (v) Laporan Arus Kas (LAK); (vi) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (vii) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Batam, 26 Mei 2026
Pimpinan BLUD SMKN 7 Batam
Provinsi Kepulauan Riau,



Pursya Dani, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710121997032006

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 7 BATAM

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN**	**6,164,559,206.00**	**4,480,667,290.00**	**72.45**	**0.00**
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	104,202,730.00	104,228,660.00	100.02	0.00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0.00	0.00		0.00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	81,800,000.00	85,700,000.00	104.77	0.00
6	Pendapatan Hibah	1,707,817,554.00	0.00	0.00	0.00
7	Pendapatan APBN/APBD	4,260,440,000.00	4,290,439,812.00	100.00	0.00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	298,922.00	298,928.00	100.00	0.00
	Jumlah PENDAPATAN	**6,164,559,206.00**	**4,480,667,290.00**	**72.45**	**0.00**
9	**BELANJA**				
10	**BELANJA OPERASI**	**3,701,905,206.00**	**2,709,387,651.84**	**73.19**	**0.00**
11	Belanja Pegawai	0.00	0.00		0.00
12	Belanja Barang dan Jasa	3,701,905,206.00	2,709,387,651.84	73.19	0.00
13	Bunga	0.00	0.00		0.00
14	Belanja Lain-lain	0.00	0.00		0.00
15	**BELANJA MODAL**	**2,462,654,000.00**	**1,767,354,000.00**	**71.19**	**0.00**
16	Belanja Tanah	0.00	0.00		0.00
17	Belanja Peralatan dan Mesin	1,948,449,000.00	1,233,149,000.00	63.29	0.00
18	Belanja Gedung dan Bangunan	0.00	0.00		0.00
19	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00		0.00
20	Belanja Aset Tetap Lainnya	534,205,000.00	534,205,000.00	100.00	0.00
21	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00		0.00
	Jumlah BELANJA	**6,164,559,206.00**	**4,476,741,651.84**	**72.39**	**0.00**
	Surplus/ Defisit Sebelum Pembiayaan	**0.00**	**3,925,638.16**	**0.00**	**0.00**
22	**PENERIMAAN**				
23	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**0.00**	**187.84**	**0.00**	**0.00**
24	Penggunaan SILPA	0.00	187.84	0.00	0.00
25	Penerimaan dari Divestasi	0.00	0.00		0.00
26	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0.00	0.00		0.00
	Jumlah PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**0.00**	**187.84**	**0.00**	**0.00**
27	**PENGELUARAN**				
28	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
29	Pembayaran Pokok Pinjaman	0.00	0.00		0.00
30	Pengeluaran Penyertaan Modal	0.00	0.00		0.00
31	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0.00	0.00		0.00
	Jumlah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**0.00**	**0.00**		**0.00**
	Pembiayaan Neto	**0.00**	**187.84**	**0.00**	**0.00**

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
	Surplus/ Defisit	**0.00**	**3,925,826.00**	**0.00**	**0.00**

Kepulauan Riau, 26 Mei 2026
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Nurfitriyani
19[illegible]06

PEMERINTAH KOTA KEPULAUAN RIAU

1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SMKN 7 BATAM

LAPORAN OPERASIONAL (BLUD)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	**PENDAPATAN**				
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	104,228,550.00	0.00	104,228,550.00	100.00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0.00	0.00	0.00	
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama	85,700,000.00	0.00	85,700,000.00	100.00
5	Pendapatan Hibah	1,707,800,000.00	0.00	1,707,800,000.00	100.00
6	Pendapatan Usaha Lainnya	316,482.00	0.00	316,482.00	100.00
7	Pendapatan APBN/ APBD	4,290,439,812.00	0.00	4,290,439,812.00	100.00
	Jumlah PENDAPATAN	**6,188,484,844.00**	**0.00**	6,188,484,844.00	100.00
8	**BEBAN**				
9	Beban Pegawai	0.00	0.00	0.00	
10	Beban Persediaan	1,926,700,624.00	0.00	1,926,700,624.00	100.00
11	Beban Jasa	738,849,878.00	0.00	738,849,878.00	100.00
12	Beban Pemeliharaan	152,033,200.00	0.00	152,033,200.00	100.00
13	Beban Langganan Daya dan Jasa	442,737,053.00	0.00	442,737,053.00	100.00
14	Beban Perjalanan Dinas	301,624,450.84	0.00	301,624,450.84	100.00
15	Beban Penyusutan Aset	1,104,352,517.08	0.00	1,104,352,517.08	100.00
16	Beban Bunga	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah BEBAN	**4,666,297,722.92**	**0.00**	4,666,297,722.92	100.00
	Surplus/Defisit Operasional	**1,522,187,121.08**	**0.00**	1,522,187,121.08	100.00
17	**KEGIATAN NON OPERASIONAL**				
18	Surplus/ Defisit Penjualan Aset Nonlancar	0.00	0.00	0.00	
19	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	0.00	0.00	0.00	
20	Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah Surplus/Defisit Dari KEGIATAN NON OPERASIONAL	**0.00**	**0.00**	0.00	
	Surplus/Defisit Sebelum POS LUAR BIASA	**1,522,187,121.08**	**0.00**	1,522,187,121.08	100.00
21	**POS LUAR BIASA**				
22	Pendapatan Luar Biasa	0.00	0.00	0.00	
23	Beban Luar Biasa	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah POS LUAR BIASA	**0.00**	**0.00**	0.00	
	Surplus/Defisit-LO	**1,522,187,121.08**	**0.00**	1,522,187,121.08	100.00

Kepulauan Riau, 28 Mei 2026

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



PEMERINTAH KOTA KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 7 BATAM
NERACA (BLUD)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	**ASET**	**1.1.**	**18,085,591,161.92**	**0.00**
2	**ASET LANCAR**	**1.1.1.**	**4,141,126.00**	**0.00**
3	Kas di Bendahara Penerimaan	1.1.1.00.	0.00	0.00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.1.1.01.	0.00	0.00
5	Kas di BLUD	1.1.1.02.	3,925,826.00	0.00
6	Kas Dana BOS	1.1.1.03.	0.00	0.00
7	Kas Dana P2SP	1.1.1.04.	0.00	0.00
8	Kas Lainnya Setara Kas	1.1.1.05.	215,300.00	0.00
9	Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum	1.1.1.06.	0.00	0.00
10	Piutang Pajak	1.1.1.07.	0.00	0.00
11	Piutang Retribusi	1.1.1.08.	0.00	0.00
12	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.08.	0.00	0.00
13	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.09.	0.00	0.00
14	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.1.10.	0.00	0.00
15	Belanja dibayar dimuka	1.1.1.11.	0.00	0.00
16	Piutang Lainnya	1.1.1.12.	0.00	0.00
17	Persediaan Badan Layanan Umum	1.1.1.13.	0.00	0.00
18	Aset Untuk Dikonsolidasikan	1.1.1.14.	0.00	0.00
	Jumlah ASET LANCAR		4,141,126.00	0.00
19	**ASET TETAP**	**1.1.2.**	**18,066,650,035.92**	**0.00**
20	Tanah	1.1.2.01.	372,418,000.00	0.00
21	Peralatan dan Mesin	1.1.2.02.	9,815,448,257.00	0.00
22	Gedung dan Bangunan	1.1.2.03.	5,602,440,116.00	0.00
23	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.1.2.04.	347,088,430.00	0.00
24	Aset Tetap Lainnya	1.1.2.06.	2,933,607,760.00	0.00
25	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.1.2.06.	0.00	0.00
26	Akumulasi Penyusutan	1.1.2.07.	(1,104,352,517.08)	0.00
	Jumlah ASET TETAP		18,066,650,035.92	0.00
27	**PIUTANG JANGKA PANJANG**	**1.1.3.**	**0.00**	**0.00**
28	Tagihan Penjualan Angsuran	1.1.3.01.	0.00	0.00
29	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	1.1.3.02.	0.00	0.00
30	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.3.03.	0.00	0.00
	Jumlah PIUTANG JANGKA PANJANG		0.00	0.00
31	**ASET LAINNYA**	**1.1.4.**	**14,800,000.00**	**0.00**
32	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.1.4.01.	0.00	0.00
33	Dana Kelolaan	1.1.4.02.	0.00	0.00
34	Aset yang dibatasi Penggunaannya	1.1.4.03.	0.00	0.00

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
35	Aset Tak Berwujud	1.1.4.04.	0.00	0.00
36	Aset Lain - Lain	1.1.4.05.	14,800,000.00	0.00
37	Akumulasi Amortisasi	1.1.4.06.	0.00	0.00
	Jumlah ASET LAINNYA		14,800,000.00	0.00
	JUMLAH ASET		18,085,591,161.92	0.00
38	**KEWAJIBAN**	**1.2.**	**215,300.00**	**0.00**
39	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**1.2.1.**	**215,300.00**	**0.00**
40	Utang Usaha	1.2.1.01.	0.00	0.00
41	Utang Pihak Ketiga	1.2.1.02.	0.00	0.00
42	Utang Pajak	1.2.1.03.	215,300.00	0.00
43	Utang Kepada KUN	1.2.1.04.	0.00	0.00
44	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.2.1.05.	0.00	0.00
45	Belanja yang masih harus dibayar	1.2.1.06.	0.00	0.00
46	Pendapatan Diterima Dimuka	1.2.1.07.	0.00	0.00
47	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.2.1.08.	0.00	0.00
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		215,300.00	0.00
48	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**1.2.2.**	**0.00**	**0.00**
49	Utang Jangka Panjang	1.2.2.01.	0.00	0.00
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0.00	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN		215,300.00	0.00
50	**EKUITAS**	**1.3.**	**18,085,375,861.92**	**0.00**
51	**EKUITAS**	**1.3.1.**	**18,085,375,861.92**	**0.00**
52	Ekuitas	1.3.1.01.	18,085,375,861.92	0.00
	Jumlah EKUITAS		18,085,375,861.92	0.00
	JUMLAH EKUITAS		18,085,375,861.92	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		18,085,591,161.92	0.00

Kepulauan Riau, 26 Mei 2026

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMK NEGERI 7 BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Nurzya'bani

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 7 BATAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (BLUD)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Ekuitas Awal		0.00	0.00
2	Surplus/Defisit-LO		1,522,187,121.08	0.00
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		16,563,188,740.84	0.00
4	Koreksi Nilai Persediaan		0.00	0.00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		0.00	0.00
6	Lain-lain		187.84	0.00
7	Ekuitas Akhir		**18,085,375,861.92**	**0.00**

Kepulauan Riau, 26 Mei 2026
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMK NEGERI 7 BATAM
DINAS PENDIDIKAN

[redacted]

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 7 BATAM
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2.1	0.00	0.00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.2.2	0.00	0.00
3	Subtotal (1-2)		0.00	0.00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	7.5.2.3	3,925,638.16	0.00
5	Subtotal (3+4)		3,925,638.16	0.00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		187.84	0.00
7	Lain-lain		0.00	0.00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	7.5.2.6	3,925,826.00	0.00

Kepulauan Riau, 26 Mei 2026
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMK NEGERI 7 BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Nurayati, S.Pd
NIP. [illegible]

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 7 BATAM
LAPORAN ARUS KAS (BLUD)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	**Arus Masuk Kas**		
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	104,228,550.00	0.00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0.00	0.00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	85,700,000.00	0.00
6	Pendapatan Hibah	0.00	0.00
7	Pendapatan APBN/APBD	4,290,439,812.00	0.00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	298,928.00	0.00
	Jumlah Arus Masuk Kas	4,480,667,290.00	0.00
9	**Arus Keluar Kas**		
10	Pembayaran Pegawai	0.00	0.00
11	Pembayaran Barang dan Jasa	1,956,884,465.00	0.00
12	Pembayaran Pemeliharaan	152,033,200.00	0.00
13	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	442,737,053.00	0.00
14	Pembayaran Perjalanan Dinas	157,732,933.84	0.00
15	Pembayaran Bunga	0.00	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas	2,709,387,651.84	0.00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi	1,771,279,638.16	0.00
16	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
17	**Arus Masuk Kas**		
18	Penjualan atas Tanah	0.00	0.00
19	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0.00	0.00
20	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0.00	0.00
21	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00
22	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00
23	Penjualan Aset Lainnya	0.00	0.00
24	Penerimaan dari Divestasi	0.00	0.00
25	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0.00	0.00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0.00	0.00
26	**Arus Keluar Kas**		
27	Perolehan Tanah	0.00	0.00
28	Perolehan Peralatan dan Mesin	1,233,149,000.00	0.00

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
29	Perolehan Gedung dan Bangunan	0.00	0.00
30	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00
31	Perolehan Aset Tetap Lainnya	534,205,000.00	0.00
32	Perolehan Aset Lainnya	0.00	0.00
33	Pengeluaran Penyertaan Modal	0.00	0.00
34	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0.00	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas	1,767,354,000.00	0.00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(1,767,354,000.00)	0.00
35	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**		
36	**Arus Masuk Kas**		
37	Penerimaan Pinjaman	0.00	0.00
38	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0.00	0.00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0.00	0.00
39	**Arus Keluar Kas**		
40	Pembayaran Pokok Pinjaman	0.00	0.00
41	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0.00	0.00
42	Penyetoran ke Kas Negara	0.00	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0.00	0.00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0.00	0.00
43	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**		
44	**Arus Masuk Kas**		
45	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	215,300.00	0.00
	Jumlah Arus Masuk Kas	215,300.00	0.00
46	**Arus Keluar Kas**		
47	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0.00	0.00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	215,300.00	0.00
48	**Kenaikan/ Penurunan Kas BLU**	4,140,938.16	0.00
49	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLU**	0.00	0.00
50	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU**	4,140,938.16	0.00

Kepulauan Riau, 26 Mei 2026

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMK NEGERI BATAM
DINAS PENDIDIKAN

BAB I

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan Keuangan BLUD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran ;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan BLUD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala BLUD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan BLUD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;

3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SMK Negeri 7 Batam Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan RiauTahun 2025.
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perbahan Kedua atas peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntasi Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 7 Batam Tahun 2025, adalah tanggungjawab sepenuhnya BLUD SMK Negeri 7 Batam, dalam hal ini adalah Pimpinan BLUD SMK Negeri 7 Batam.

1.4 Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 7 Batam tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 7 Batam tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (*Subsequent Event*) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 7 Batam tahun 2026. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2026.

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 7 Batam adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 7 Batam
- 1.4 Periode Pelaporan Keuangan
- 1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Profil BLUD SMK Negeri 7 Batam
- 2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 7 Batam
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 7 Batam
- 2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 7 Batam tahun 2025

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025
- 2. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Asumsi dasar Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- 4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja
- 4.7 Kebijakan Akuntansi Kas
- 4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan
- 4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- 4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Neraca
- 5.4 Laporan Operasional
- 5.5 Laporan Arus Kas
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.7 Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan atas informasi – Informasi non Keuangan
- 6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
- 6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

Bab VII Penutup

BAB II PROFIL BLUD SMK NEGERI 7 BATAM

2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 7 Batam

BLUD SMK Negeri 7 Batam memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten serta tenaga ahli yang mendukung pelaksanaan *Teaching Factory (TEFA)*. SDM yang tersedia meliputi:

1. Tenaga Pendidik (Guru Produktif dan Normatif):
   - Guru bersertifikasi keahlian industri sesuai bidang kompetensi.
   - Guru mata pelajaran umum yang mendukung kurikulum berbasis kompetensi.
   - Instruktur dari dunia industri yang terlibat dalam program pelatihan siswa.
2. Tenaga Kependidikan:
   - Staf administrasi yang mengelola keuangan dan operasional BLUD.
   - Teknisi laboratorium dan bengkel untuk mendukung kegiatan praktik.
   - Tenaga keamanan dan kebersihan untuk menjaga lingkungan sekolah yang kondusif.
3. Kemitraan dengan Industri:
   - Mengundang praktisi industri sebagai instruktur tamu.
   - Menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk program magang dan penyerapan tenaga kerja.
   - Mengembangkan skema sertifikasi kompetensi yang diakui dunia usaha dan industri.

Sebagai SMK BLUD yang berbasis *Teaching Factory* (TEFA) dan Unit Produksi (UP), sekolah telah memiliki berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran berbasis produksi dan layanan industri, di antaranya:

1. Ruang Kelas dan Laboratorium:
   - Ruang kelas berbasis IT untuk pembelajaran teori.
   - Laboratorium komputer untuk simulasi desain grafis.
   - Perpustakaan sebagai pusat referensi dan literasi siswa.
2. Workshop dan Bengkel TEFA / UP:
   - Klinik Komputer yang dikelolah oleh TEFA TKJ
   - Studio desain dan multimedia untuk produksi konten digital dan video.
3. Fasilitas Pendukung:
   - Asrama atau tempat tinggal bagi siswa yang berasal dari luar daerah.
   - Dapur produksi Roti
   - Ruang pemasaran produk hasil Teaching Factory.
   - Area publik seperti kantin, Lapangan Futsal, Ruang Meeting

Sebagai BLUD, SMK memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan Teaching Factory. Sumber dana sekolah berasal dari:

1. Dana BOS dan APBD:
   - Digunakan untuk operasional sekolah, serta pengadaan bahan ajar dan alat praktik.
2. Pendapatan dari Unit Usaha TEFA:
   - Hasil penjualan produk dari unit Teaching Factory.
   - Jasa layanan seperti servis komputer, laptop dan *Handphone*
   - Kerjasama dengan industri dalam proyek tertentu.
3. Bantuan dari Pemerintah dan Swasta:

- Hibah atau bantuan dari pemerintah untuk pengembangan kurikulum dan fasilitas.
- Sponsor dari perusahaan yang mendukung pengembangan Teaching Factory.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 7 Batam

SMK Negeri 7 Batam sebagai Satuan Kerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki arah kebijakan yang menekankan pada pengembangan pendidikan kejuruan berbasis industri. Kebijakan ini disusun untuk menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (IDUKA) di Kota Batam yang berkembang pesat serta untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dan siap pakai.

A. Arah Kebijakan Pendidikan Kejuruan Berbasis Industri

Arah kebijakan pendidikan kejuruan berbasis industri mencakup beberapa hal berikut:

1. Penyelarasan Kurikulum dengan Kebutuhan Industri Kurikulum SMK Negeri 7 Batam dirancang agar selaras dengan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja, termasuk penerapan modul praktikum berbasis Teaching Factory (TEFA) dan praktik kerja industri (PRAKERIN). Dengan demikian, lulusan memiliki pengalaman kerja nyata yang meningkatkan daya saing mereka di pasar tenaga kerja.
2. Pengembangan Kompetensi Berbasis Sertifikasi Sekolah mendorong seluruh peserta didik dan tenaga pendidik mengikuti program sertifikasi kompetensi, baik nasional maupun internasional, sesuai bidang keahlian masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menjamin kualitas lulusan dan meningkatkan kepercayaan IDUKA terhadap kompetensi lulusan SMK Negeri 7 Batam.
3. Peningkatan Kualitas Fasilitas dan Sarana Prasarana Untuk mendukung pendidikan berbasis industri, sekolah secara bertahap meningkatkan laboratorium, workshop, ruang praktik, dan fasilitas TEFA agar sesuai standar dunia kerja. Kebijakan ini juga mencakup pengembangan sarana berbasis digital untuk mendukung kompetensi di era teknologi.
4. Kolaborasi dan Kemitraan dengan Dunia Industri SMK Negeri 7 Batam membangun hubungan strategis dengan berbagai industri, perusahaan, dan lembaga terkait untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Kemitraan ini meliputi penyediaan magang, pelatihan guru, pengembangan kurikulum, serta proyek bersama di TEFA.
5. Penguatan Peran BLUD dalam Pendidikan Vokasi Status BLUD memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya, sehingga sekolah dapat lebih leluasa mengembangkan unit produktif, meningkatkan layanan pendidikan, serta mendukung inovasi pendidikan berbasis industri secara berkelanjutan. 28 Dengan arah kebijakan ini, SMK Negeri 7 Batam menegaskan komitmennya untuk menjadi pusat pendidikan vokasi unggul yang menghasilkan lulusan siap kerja, kompeten, dan memiliki daya saing global.

B. Strategi Penguatan Manajemen BLUD

Penguatan manajemen BLUD SMK Negeri 7 Batam menjadi salah satu fokus utama dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya sekolah. Strategi ini dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan strategis, kinerja layanan, serta keberlanjutan pendidikan vokasi berbasis industri.

Beberapa strategi utama penguatan manajemen BLUD meliputi:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) BLUD Tenaga kependidikan dan pengelola BLUD diberikan pelatihan manajemen

keuangan, perencanaan program, serta pengembangan kompetensi administratif agar mampu mengelola BLUD secara profesional dan sesuai peraturan pemerintah.

2. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan BLUD SMK Negeri 7 Batam menerapkan mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan yang transparan. Pendapatan dari unit TEFA, layanan pendidikan, dan sumber BLUD lainnya dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung operasional dan pengembangan sekolah.
3. Penerapan Sistem Akuntabilitas dan Pelaporan Setiap unit dan program BLUD diwajibkan memiliki standar operasional prosedur (SOP), dokumen pelaporan rutin, dan mekanisme evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas internal dan eksternal serta memudahkan monitoring kinerja.
4. Penguatan Sistem Informasi dan Monitoring Kinerja Implementasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi memungkinkan pengawasan real-time atas keuangan, sarana-prasarana, kegiatan pembelajaran, dan proyek TEFA. Sistem ini juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
5. Efisiensi dan Inovasi Layanan BLUD BLUD diarahkan untuk mengoptimalkan layanan pendidikan dan unit produktif, termasuk inovasi dalam TEFA, kursus singkat, dan layanan jasa berbasis industri, sehingga menambah sumber pendapatan sekolah sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran.
6. Peningkatan Kepatuhan Regulasi BLUD Seluruh kegiatan BLUD dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan gubernur, peraturan daerah, dan standar akuntansi pemerintah, untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan operasional. 29 Melalui strategi penguatan manajemen BLUD ini, SMK Negeri 7 Batam diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai institusi pendidikan vokasi yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan industri, sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik dan masyarakat.

2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 7 Batam

Tabel Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
BLUD SMK Negeri 7 Batam

No	Unit Teaching Factory (TEFA)	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Keterangan
1	**TEFA Teknik Jaringan & Komputer**	Jasa Perbaikan Laptop dan HP, Jasa Print dan Fotocopy, Penjualan Alat Tulis Kantor	33.656.000,00	33.656.000,00	100	Suku cadang tersedia, namun ada keterlambatan pengiriman
2	**TEFA KK Desain Komunikasi Visual**	Jasa Foto dan Percetakan	0,00	0,00		
3	**TEFA Teknik Jaringan Akses & Telekomunikasi (TJAT)**	Penjual Voucher Internet	68.313.750,00	68.313.750,00	100	Harga bahan baku mengalami kenaikan
4	**TEFA KK Teknik Instalasi Tenaga Listrik**	Jasa instalasi listrik dan cuci AC	0,00	0,00		
5	**TEFA Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)**	Jasa Pembuatan Website	1.500.000,00	1.500.000,00	100 %	Ada beberapa alat yang masih dalam proses pembelian
4	**UP Manajemen Perkantoran**	Produksi Roti	732.980,00	732.980,00	97%	Target produksi tercapai, hanya ada sedikit sisa bahan

BAB III

INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja pada BLUD SMK, pada laporan keuangan ini digunakan sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat management yang digunakan untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran dan tujuan, untuk mewujudkan misi dan visi organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut akan disajikan data kinerja BLUD SMK Negeri 7 Batam Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target BLUD SMK Negeri 7 Batam Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
A. Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa					
1	Persentase kelulusan siswa	100%	100%	100%	Semua Siswa Lulus
2	Rata-rata nilai Ujian Kompetensi Keahlian (UKK)	≥ 80	95%	118,75%	Mencapai target
3	Persentase siswa yang memperoleh sertifikasi kompetensi industri	70%	71%	101,42%	Beberapa siswa belum lulus uji sertifikasi
4	Persentase lulusan yang bekerja sesuai kompetensi dalam 6 bulan	40%	45%	112,5%	Melebihi Target Siswa yang bekerja sesuai kompetensi
5	Persentase lulusan yang berwirausaha	5%	5%	100%	Mencapai Target
B. Kinerja Keuangan dan Unit Usaha BLUD					
6	Persentase pendapatan unit usaha BLUD terhadap biaya operasional sekolah	30%	28%	93%	Hampir mencapai target, strategi pemasaran perlu ditingkatkan
7	Efisiensi penggunaan dana BLUD sesuai rencana kerja	90%	95%	105%	Anggaran terserap dengan baik dan efektif
C. Kinerja Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)					
8	Jumlah kerja sama aktif dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	20 mitra	20 mitra	100%	Sesuai target, kerja sama dengan lebih banyak perusahaan
9	Persentase siswa yang menjalani magang industri	100%	100%	100%	Semua siswa telah menjalani magang
10	Jumlah produk atau jasa unggulan dari Teaching Factory (TEFA)	3 produk	3 produk	100%	Semua Produk mencapai standar pasar
D. Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan					
11	Kepuasan siswa dan orang tua terhadap layanan pendidikan	85%	85%	100%	Sesuai target berdasarkan survei internal
12	Jumlah guru produktif bersertifikasi industri	75%	75%	100%	Hampir mencapai target, ada guru dalam proses sertifikasi

Berdasarkan tabel pencapaian, secara keseluruhan SMK BLUD telah mencapai rata-rata 98% dari target yang ditetapkan. Beberapa indikator bahkan melebihi target, seperti wirausaha lulusan, jumlah mitra industri, dan kepuasan siswa. Namun, ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan,

seperti pencapaian sertifikasi kompetensi siswa dan pengembangan produk Teaching Factory. Untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memperkuat kemitraan dengan industri untuk meningkatkan jumlah lulusan yang bekerja sesuai kompetensi.
2. Optimalisasi pemasaran unit usaha BLUD untuk meningkatkan pendapatan sekolah.
3. Meningkatkan kesiapan siswa dalam uji sertifikasi industri melalui bimbingan tambahan.
4. Pengembangan produk Teaching Factory agar lebih kompetitif di pasar.

Dengan perbaikan strategi ini, diharapkan SMK BLUD dapat mencapai 100% target di tahun mendatang.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Adapun hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target realisasi antara lain :

a. Hambatan dalam Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa
   1. Kurangnya kesiapan siswa dalam ujian sertifikasi industri
      - Tidak semua siswa memiliki kesiapan yang cukup untuk lulus uji sertifikasi.
      - Kurangnya akses terhadap bahan ajar atau simulasi ujian sesuai standar industri.
      - Biaya sertifikasi yang masih menjadi kendala bagi sebagian siswa.
   2. Tingkat kelulusan yang belum 100%
      - Beberapa siswa mengalami kesulitan dalam mata pelajaran teori maupun praktik.
      - Kurangnya motivasi belajar dan tingkat kehadiran siswa yang rendah.
   3. Penyerapan lulusan ke dunia kerja belum optimal
      - Persaingan ketat di dunia kerja sehingga tidak semua lulusan langsung terserap.
      - Kurangnya pengalaman praktis yang relevan dengan kebutuhan industri.
      - Masih ada lulusan yang lebih memilih bekerja di luar bidang keahlian mereka.

b. Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan dan Unit Usaha BLUD
   1. Pendapatan unit usaha BLUD belum mencapai target
      - Persaingan dengan produk atau jasa dari industri komersial yang lebih mapan.
      - Kurangnya strategi pemasaran dan branding produk/jasa SMK BLUD.
      - Keterbatasan modal untuk meningkatkan skala produksi dan inovasi produk.
   2. Efisiensi penggunaan dana BLUD
      - Masih ada beberapa program yang belum berjalan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas.
      - Keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah atau sumber pendanaan lain.

c. Hambatan dalam Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)
   1. Jumlah produk unggulan Teaching Factory belum optimal
      - Keterbatasan bahan baku atau alat produksi yang menyebabkan terhambatnya pengembangan produk baru.
      - Produk belum sepenuhnya sesuai standar pasar, sehingga masih butuh perbaikan dalam kualitas dan pemasaran.
   2. Kemitraan industri masih perlu diperluas

- Tidak semua industri bersedia menerima siswa magang karena keterbatasan kapasitas mereka.
- Kurangnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja.

d. Hambatan dalam Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan

1. Tingkat kepuasan siswa dan orang tua belum maksimal
   - Beberapa siswa merasa materi pembelajaran masih kurang relevan dengan dunia kerja.
   - Orang tua belum sepenuhnya memahami konsep BLUD di SMK, sehingga kurang mendukung program sekolah.
2. Kurangnya jumlah guru bersertifikasi industri
   - Tidak semua guru memiliki kesempatan mengikuti pelatihan atau sertifikasi karena keterbatasan waktu dan biaya.
   - Masih ada kendala administratif dalam proses pengajuan sertifikasi guru ke lembaga industri terkait.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Akuntansi adalah BLUD SMK Negeri 7 Batam Provinsi Kepulauan Riau.

4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas;
b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 7 Batam Provinsi Kepulauan Riau adalah:

a) ***Basis Kas*** untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam ***Laporan Realisasi Anggaran***
Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat Kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

b) ***Basis akrual*** untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam ***Neraca***
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

c) ***Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran*** berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

d) ***Basis akrual untuk neraca*** berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas;

4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengakuan dan pengukuran atas transaksi kejadian ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan ini adalah:

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.
   Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD , adalah sebagai berikut:
   a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
   b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;

c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 7 Batam tahun 2025, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat Diterima pada Rekening Kas Umum. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum untuk seluruh transaksi setelah dilakukan pengesahan definitif bendahara. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

4.7 Kebijakan Akuntansi Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas secara umum diakui jika memenuhi kriteria:

a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.

4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari:

- Barang Konsumsi;
- Bahan untuk pemeliharaan;
- Suku cadang;
- Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
- Bahan baku;
- Barang dalam proses/setengah jadi;

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal; diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.

4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.

4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan

dengan pegawai yang bekerja, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

BAB V RINCIAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang telah disusun BLUD SMK Negeri 7 Batam periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini:

5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan – LRA

Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 7 Batam mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp 4.480.667.290 atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 6.184.559,206 sebagaimana ikhtisar sebagai berikut:

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	200.000.000	104.228.550,00	52.11	104.228.550,00
Pendapatan BLUD dari Hibah	1,707,817,554.00	0,00	100	1.707.800.000,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	81.800.000,00	85.700.000,00	104,77	85.700.000,00
Pendapatan BLUD dari APBD	4.290.440.000	4,290,439,812.00	100	4,290,439,812,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	298.922,00	298.928,00	100	316.482,00
TOTAL PENDAPATAN BLUD	**6,184,559,206,00**	**4.480.667.290,00**	**72.45**	**4.480.667.290,00**

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Tahun 2025 sebesar Rp 104.228.550 atau 100% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 104.202.730 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Pendapatan TEFA TKJ	68.313.750,00	68.313.750,00	100	68.313.750,00
Pendapatan TEFA TJA	33.656.000,00	33.656.000,00	100	33.656.000,00
Pendapatan TEFA RPL	1.500.000,00	1.500.000,00	100	1.500.000,00
UP MP	732.980,00	758.800,00	**103,5**	**758.800,00**
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	**104.202.730,00**	**104.228.550,00**	**100**	**104.228.550,00**

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp1.707.817.554,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024
Hibah Bantuan TEFA	1.500.000.000,00	0,00		0,00
Hibah Kementerian	25.000.000,00,00	0,00		0,00
Hibah Bantuan Pembelajaran Mendalam	100.000.000,00	0,00		0,00
Hibah Bantuan ADEM	82.817.554,00	0,00		0,00
Total Pendapatan BLUD dari Hibah	**1.707.817.554,00**	0,00		0,00

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Tahun 2025 sebesar Rp 85.700.000,00 atau 104,77% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 81.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	%	Realisasi 2023
Kantin	74.100.000,00	78.000.000,00	105.26	78.000.000,00
Bisnis Centre (BCS)	5.000.000,00	5.000.000,00	100	5.000.000,00
Sewa Ruang Meeting	2.700.000,00	2.700.000,00	100	2.700.000,00
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	**81.800.000,00**	**85.700.000,00**	**104,77**	**85.700.000,00**

iv) Pendapatan BLUD dari APBD/APBN

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD/APBN Tahun 2025 sebesar Rp 4.290.439.812,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp4.290.440.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Dana BOSP	4.290.440.000,00	4.290.439.812,00	100	4.290.439.812,00
Dana BOSDA	0,00	0,00	0	
Total Pendapatan BLUD dari APBD	4.290.440.000,00	4.290.439.812,00	100	4.290.439.812,00

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Tahun 2025 sebesar 298.928,00 atau 100% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 298.992 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi 2025(Rp)	%	Realisasi 2024
Bunga Giro	298.922,00	298.928,00	100 %	0,00
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	**298.992,00**	**298.928,00**	**100%**	0,00



b. Belanja

1. Belanja Pegawai BLUD

Berupa Belanja Gaji & Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan BLUD dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % dari total anggaran belanja pegawai BLUD yang sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	ANGGARAN(Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0
Belanja Tambahan Penghasilan	0,00	0,00	0
Total Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp 32.709.387.651,84 atau 73.19% dari total anggaran belanja barang dan jasa yang sebesar Rp 3.619.087.652 dengan rincian sebagai berikut :.

	ANGGARAN (Rp)	REALISASI(Rp)	%
Belanja Barang	2,066,160,624,00	1.586.092.541,000	76.77%
Belanja Jasa	1,099,269,377,00	813.528.977,00	74.01%
Belanja Pemeliharaan	152,033,200,00	152,033,200,00	100
Belanja Perjalanan dinas	301,624,451,00	157.732.933,84	52.29%
Total Belanja Barang dan Jasa BLUD	**3.619.087.652,00**	**2.709.387.651,84**	**73.19%**

3. Belanja Modal BLUD

Belanja modal BLUD terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin dan Belanja Aset Tetap lainnya yang terealisasi sebesar Rp1.233.149.000,00 atau 63.29% dari total anggaran belanja modal peralatan dan mesin dan Belanja Aset Tetap Lainnya yang sebesar Rp2.482.654.000 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Belanja Tanah	0,00	0,00		0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.948.449.000,00	1.233.149.000,00	63.29 %	0,00
Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00		0,00
Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00		0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	534.205.000,00	534.205.000,00	100	0,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0	0,00
Total Belanja Modal BLUD	**2.482.654.000,00**	**1.767.354.000,000**	**71.19%**	**0,00**

5.2 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo awal SAL pada tahun 2025 sebesar Rp0,00 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

2) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan digunakan dalam rangka membiayai defisit tahun anggaran berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

3) Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SiLPA tahun 2025 sebesar Rp3.925.826,00

5.3 Neraca

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- Berupa kas/setara kas dan persediaan

Aset Lancar sebesar Rp 0,00 yang dimiliki BLUD SMK Negeri 7 Batam per 31 Desember 2025 terdiri dari:

a. Kas di Bendahara BLUD

Kas BLUD adalah semua bentuk penerimaan dan pengeluaran uang tunai atau setara kas yang dikelola oleh SMK Negeri 7 Batam dalam rangka menjalankan operasionalnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, dan pendapatan lainnya. Pada tahun 2024 saldo Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp 3.925.826,00 dengan rincian :

Uraian	Jumlah (Rp)
Rek Bank BRKS Penerimaan BLUD (186-43-01451)	0,00
Rek Bank BRKS Penerimaan BLUD (1.860.100.007)	12.329
Rek Bank BRKS KAS BLUD (1.860.100.008)	3
Rek Bank BRKS Pengeluaran BLUD (1.860.100.009)	3
Kas Tunai	3.913.491
Total Kas di Bendahara BLUD	**3.925.826**

b. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan kas dibawah pengelolaan bendahara BOS yang bersumber dari pemerintah untuk mendukung operasional sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan tanpa membebani peserta didik. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BOS sebesar RP 215.300 dengan rincian :

Uraian	Jumlah (Rp)
Kas di Bank	.0,00
Rek Bank 186-38-26157	0,00
Rek Bank	0,00

Kas Tunai	215.300.0,00
Total Kas di Bendahara BOS	**215.300.0,00**

c. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 00,00 terdiri dari :

Uraian	Jumlah(Rp)
Persediaan Barang Habis Pakai	0,00
- Bahan	000
- Suku Cadang	0,00
Persediaan BarangTidak Habis Pakai	0,00
Total Persediaan	**0,00**

2. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh pelayanan umum. Aset tetap sebesar Rp 17.918.093.553,82 per 31 Desember 2025 merupakan nilai perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan yang pengadaannya bersumber dari pengelolaan dana BOS dan dana SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dan BLUD.

a. Tanah

Nilai aset tanah BLUD SMK Negeri 7 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp 372.418.000,00 dan tidak terdapat penambahan aset tetap tanah selama tahun 2025.

b. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin BLUD SMK Negeri 7 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.915.448.25,00. Adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**0,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.915.448.275,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	0,00
- Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kementerian	0,00
Total Penambahan	**9.915.448.275,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	0,00
Total Pengurangan :	**0,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**9.915.448.275,00**

c. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan BLUD SMK Negeri 7 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp 5.602.440,116 tidak terdapat penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2025. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**0,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.602.440.116
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	0,00
- Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kementerian	0,00
Total Penambahan	**5.602.440.116**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	0,00
Total Pengurangan :	**0,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**5.602.440.116**

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD SMK Negeri 7 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp 347.088.430,00 tidak terdapat penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2025. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**0,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	347.088.430,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	0,00
- Hibah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kementerian	0,00
Total Penambahan	**347.088.430,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	0,00
Total Pengurangan :	**0,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**347.088.430,00**

e. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Aset Tetap Lainnya BLUD SMK Negeri 7 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.933.607.750,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	**0,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.933.607.750,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	0,00
- Hibah Aset Tetap Lainnya dari Kementerian	0,00
Total Penambahan	2.933.607.750,00
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Lainnya	0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	0,00
Total Pengurangan :	**0,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya	**2.933.607.750,00**

3. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya dapat berupa Aset Tidak Berwujud dan Aset Rusak Berat/Tidak Digunakan Lagi dalam Operasional Kegiatan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 7 Batam mencatat Aset Lainnya sebesar Rp 14.800.000 terdiri dari Aset Tidak Berwujud (Software, dll) Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Lainnya	**0,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Lainnya	14.800.000,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	0,00
- Hibah Aset Lainnya dari Kementerian	0,00
Total Penambahan	14.800.000,00
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Lainnya	0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel... Dst	0,00
Total Pengurangan :	**0,00**
Saldo Akhir Aset Lainnya	**14.800.000**

4. Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 7 Batam Memiliki kewajiban Hutang PFK Rp. 215.300.

5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD SMK Negeri 7 Batam pada tanggal laporan. koreksi Ekuitas 16.563.188.553 merupakan saldo awal Tahun 2025 terdiri dari:

Uraian	Jumlah(Rp)
Saldo Awal Ekuitas	**0,00**
- Surplus/Defisit LO	1.522.187.121,08
- Koreksi Ekuitas	16.563.188.740,84
Saldo Ekuitas Akhir	**18.085.375.861,92**
- Tanah	372.418.000,00
- Peralatan dan Mesin	9.915.448.257,00
- Gedung dan Bangunan	5.602.440,116
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	347.088.430,00
- Aset Tetap Lainnya	2.933.607.780
- Aset lain - lain	14.800.000,00

5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional
b) Beban dari kegiatan operasional
c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
d) Pos luar biasa
e) Surplus/defisit LO

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional

Pendapatan LO dari kegiatan operasional terdiri dari :

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2025 sebesar Rp104.228.550,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan TEFA TKJ	68.313.750,00	0,00	0	68.313.750,00
Pendapatan TEFA TJA	33.656.000,00	0,00	0	33.656.000,00
Pendapatan TEFA RPL	1.500.000,00	0,00	0	1.500.000,00
UP MP	732.980,00	0,00	0	732.980,00
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO	**104.228.550**	**0,00**	**0**	**104.228.550**

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2025 sebesar Rp1.707.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Bantuan Guru	25.000.000,00	0,00	0	25.000.000,00
Pendapatan Bantuan Pembelajaran Mendalam	100.000.000,00	0,00	0	100.000.000,00
Pendapatan Bantuan Teaching Factory	1.5000.000.000,00	0,00	0	1.5000.000.000,00
Pendapatan Bantuan Afirnasi Pendidikan Menengah	82.800.000,00	0,00	0	82.800.000,00

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Total Pendapatan BLUD dari Hibah LO	**1.707.800.000,00**	**0,00**	**0**	**1.707.800.000,00**

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO Tahun 2025 sebesar Rp85.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Sewa Kantin	78.000.000,00	0,00	0	78.000.000,00
Sewa Gedung/Aula/Lab	2.700.000,00	0,00	0	2.700.000,00
Sewa Business Center	5.000.000,00	0,00	0	5.000.000,00
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO	**85.700.000,00**	**0,00**	**0**	**85.700.000,00**

iv) Pendapatan BLUD dari APBD/APBN LO

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD LO Tahun 2025 sebesar Rp4.290.439.812,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dana BOSP	4.290.439.812,00	0,00	0%	4.290.439.812,00
Dana BOSDA	0,00	0,00	0%	0,00
Total Pendapatan BLUD dari APBD LO	**4.290.439.812,00**	**0,00**	**100%**	**4.290.439.812,00**

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2025 sebesar Rp316.482,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)(Rp)
Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	316,482.00	0,00	0	316,482.00
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO	**316.482,00**	**0,00**	**0**	**316.482.00**

b) Beban dari kegiatan operasional

1. **Belanja Pegawai BLUD LO**

Berupa Beban Gaji & Tunjangan dan Beban Tambahan Penghasilan BLUD LO dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp00,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)(Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0	0,00
Beban Tambahan Penghasilan	0,00	0,00	0	0,00
Total Beban Pegawai BLUD	0,00	0,00	0	0,00

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Beban barang dan jasa LO tahun 2025 terealisasi sebesar Rp4.666.297.722,92 dengan rincian sebagai berikut :.

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)(Rp)
Beban Pegawai	0,00	0,00		0,00
Beban Persediaan	1.926.700.624,00	0,00	100 %	1.926.700.624,00
Beban Jasa	738.849.878,00	0,00	100 %	738.849.878,00
Beban Pemeliharaan	152.033.200,00	0,00	100 %	152.033.200,00
Beban Langganan Daya dan Jasa	442.737.053,00	0,00	100 %	442.737.053,00
Beban Perjalanan Dinas	301.624.450,84	0,00	100 %	301.624.450,84
Beban Penyusutan Aset	1.104.352.517,08	0,00	100 %	1.104.352.517,08
Beban Bunga	0,00	0,00	0	0,00
Total Beban Barang dan Jasa BLUD	**4.666.297.722,92**	**0,00**	**0**	**4.666.297.722,92**

c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan dikelompokkan dalam kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional BLUD SMK Negeri 7 Batam tahun 2025 sebesar Rp0,00

d) Surplus/defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan beban. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 7 Batam mencatat surplus/Defisit LO sebesar
Rp1.522.187.121,08

5.5 Laporan Arus Kas

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi BLUD SMK Negeri Batam dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi BLUD SMK Negeri 7 Batam pada Tahun 2025 sebesar Rp4.480.667.290 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	104,228,550.00	0,00
Pendapatan Jasa Layanan Dari Entitas Akuntansi	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama	85.700.000,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Hibah	0,00	0,00
Pendapatan BLUD dari APBD	4,290,439,812,00	00,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	298.928,00	00,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	**4.480.667.290,00**	**00,00**

b. Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi BLUD SMK Negeri 7 Batam selama Tahun 2025 sebesar Rp2.709.387.651,84 terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pembayaran Pegawai	0,00	00,00
Pembayaran Barang dan Jasa	1.956.884.465,00	00,00
Pembayaran Pemeliharaan	152.033.200,00	0,00
Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	442.737.053,00	0,00
Pembayaran Perjalanan Dinas	157.732.933,84	0,00
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	**2.709.387.651,84**	**00,00**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah selisih dari Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah

Rp1.771.279.638,16 Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.771.279.638,16	00,00

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset Non-Keuangan lainnya.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan di masa yang akan datang.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 7 Batam pada Tahun 2025 sebesar Rp0,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan Aset Tetap Tanah	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan dari Divestasi	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	**0,00**	**0,00**

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 7 Batam pada Tahun 2025 sebesar Rp1.767.354.000 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	**0,00**	**0,00**
Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.233.149.000,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	534.205.000,00	0,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	**1.767.354.000,00**	**0,00**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp1.767.354.000 Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	1.767.354.000,00	00,00

3) Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Periode 2025

Kenaikan/(penurunan) Kas Bersih Selama Periode Tahun 2025 merupakan akumulasi jumlah kenaikan/(penurunan) kas bersih dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris.

Selama Tahun Anggaran 2025 terjadi kenaikan/penurunan kas bersih sebesar Rp4.140.938,16 yang terdiri dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.771.279.638,16 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp1.767.354.000 Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp. 215.300 Perbandingan Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	4,140,938.16	0,00

4) Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025

Saldo akhir kas per 31 Desember 2025 merupakan perhitungan Saldo Awal per 1 Januari 2025 ditambah (dikurangi) dengan kenaikan/ (penurunan) kas bersih selama periode tahun 2025.
Saldo akhir kas di BLUD SMK Negeri 7 Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp 4.140.938,16 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
Kas di BLUD	3.925.826,00	00,00
Kas Dana BOS	215.300,00	187,84
Saldo Akhir Kas	**4.141.126,00**	**187,84**

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

a) Ekuitas awal
b) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti:
   1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
   2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas Akhir

a) Ekuitas Awal

Pada Tahun 2025 BLUD SMK Negeri 7 Batam mencatat ekuitas awal sebesar Rp 0,00 yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada laporan Tahun 2025. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jumlah Aset Tahun 2025 Rp 18.085.591.161,92
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025 Rp
- **Saldo Awal Ekuitas 2025 Rp 18.085.591.161,92**

b) Surplus/Defisit LO

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dalam Laporan Operasional Tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.522.187.121,08

c) Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar Rp 18.085.375.861,92 merupakan saldo kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Total Aset dan Total Kewajiban BLUD SMK Negeri 7 Batam Tahun 2025.

- Jumlah Aset Tahun 2025 Rp18.085.375.861,92
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025 Rp 215.300
- **Saldo Akhir Ekuitas 2025 Rp 18.0850160561,92**

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

BLUD SMK Negeri 7 Batam dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 1407 Tahun 2024

BLUD SMK Negeri 7 Batam beralamat di Perum Sekawan Pemko, Kelurahan Berlian Kecamatan Batam Kota.

6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

BLUD SMK Negeri 7 Batam adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nirlaba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra BLUD SMK Negeri 7 Batam, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala BLUD SMK Negeri 7 Batam.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 7 Batam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun sebagai bentuk tanggung jawab BLUD SMK Negeri 7 Batam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, penyusunan laporan keuangan BLUD juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Secara umum pencapaian kinerja atas sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik, namun begitu masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang masih harus terus dibenahi dan menjadi perhatian oleh BLUD SMK Negeri 7 Batam

Dengan memperhatikan strategisnya peran sekolah dan besarnya tantangan yang dihadapi untuk mendukung Visi Misi Pendidikan Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, SMK Negeri 7 Batam Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja serta memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan industri. Melalui pendekatan berbasis kompetensi, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta pengelolaan keuangan yang transparan melalui sistem BLUD, sekolah ini berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan lulusan SMK dapat menjadi tenaga kerja yang unggul dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Akhir kata, BLUD SMK Negeri 7 Batam Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan dalam penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban kami dalam menyajikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

Tanjungpinang, 25 Mei 2026
PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 7 Batam
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Ratna Yuni, M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197038[illegible]1997032006

LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SMK NEGERI 1 TANJUNGPINANG
TAHUN 2025

AUDITED

bludskansatpi08@gmail.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL 1

DAFTAR LAMPIRAN 2

KATA PENGANTAR 3

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB 4

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 5

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 6

NERACA 7

LAPORAN OPERASIONAL 8

LAPORAN ARUS KAS 9

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 10

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 11

BAB I PENDAHULUAN 12

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 12

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 13

1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 15

1.4 Periode Pelaporan Keuangan 15

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 15

BAB II PROFIL BLUD SMK NEGERI 1 TANJUNGPINANG 17

2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang 17

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang 18

BAB III INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 26

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025 26

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 30

4.1 Entitas Akuntansi 30

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 30

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 31

4.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan 31

4.5 Kebijakan Akuntansi Belanja 32

4.5 Kebijakan Akuntansi Belanja 32
4.6 Kebijakan Akuntansi Kas 32
4.7 Kebijakan Akuntansi Persediaan 32
4.8 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap 33
4.9 Kebijakan Akuntansi Kewajiban 33
BAB V RINCIAN POS POS LAPORAN KEUANGAN 35
5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 35
5.2 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 39
5.3 Neraca 40
5.4 Laporan Operasional 45
5.5 Laporan Arus Kas 49
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas 54
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN 56
6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi 56
6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas 56
BAB VII PENUTUP 57

DAFTAR TABEL

2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi 1 22
2.2 Anggaran Dan Realisasi Program 1 25
3.1 Indikator Kinerja dan Pencapaian 1 27
5.1 Pendapatan LRA 36
5.1.1 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 36
5.1.2 Pendapatan BLUD dari Hibah 37
5.1.3 Pendapatan BLUD dari Kerjasama 37
5.1.4 Pendapatan BLUD dari APBD 38
5.1.5 Pendapatan BLUD dari Lain Yang Sah 38
5.1.6. Belanja Pegawai BLUD 38
5.1.7 Belanja Barang dan Jasa BLUD 39
5.1.8 Belanja Modal BLUD 39
5.3 Kas di Bendahara BLUD 40
5.3.1 Kas Di Bendahara BOS 40
5.3.2 Persediaan 41
5.3.3 Peralatan Dan Mesin 42
5.3.4 Gedung dan Bangunan 42
5.3.5 Jalan,Irigasi dan Jaringan 43
5.3.6 Aset Tetap Lainnya 44
5.3.7 Aset Lainnya 44
5.3.8 Ekuitas 45
5.4 Laporan Operasional 46
5.4.1 Pendapatan Jasa Layanan LO 47
5.4.2 Pendapatan Kerjasama LO 47
5.4.3 Pendapatan BLUD dari APBD LO 47
5.4.4 Pendapatan BLUD dari Lain Yang Sah 48
5.4.5 Belanja Pegawai LO 48
5.4.6 Belanja Barang dan Jasa LO 49
5.5 Arus Masuk Kas Dari Operasi 50
5.5.1 Arus Keluar Kas Dari Aktifitas 51
5.5.2 Jumlah Arus Kas Bersih 51
5.5.3 Arus Kas Masuk Investasi 52
5.5.4 Arus Kas Keluar Investasi 53
5.5.5 Jumlah Arus Kas Bersih Investasi 53
5.5.6 Kenaikan dan Penurunan Kas Bersih 54
5.5.7 Saldo Akhir Kas 54

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kami berharap dengan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) di Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD SMKN 1 Tanjungpinang

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sulasmi, S.Pd.,M.M

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP 196908121994122008

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan SMKN 1 Tanjungpianang Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (iii) Neraca; (iv) Laporan Operasional (LO); (v) Laporan Arus Kas (LAK); (vi) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (vii) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 25 Mei 2026

Pimpinan BLUD SMKN 1 Tanjungpinang

Provinsi Kepulauan Riau,

Sulasmi, S.Pd.,M.M

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP 196908121994122008

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 1 TANJUNG PINANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN**	**1.797.057.246,23**	**736.307.788,00**	**40,97**	**6.407.718.938,00**
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	1.797.602.246,23	684.552.300,00	40,09	968.983.935,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	87.000.000,00	45.600.000,00	52,41	0,00
6	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	1.510.865.000,00
7	Pendapatan APBN/APBD	0,00	0,00	0,00	3.927.870.000,00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	2.425.000,00	6.155.488,00	253,83	0,00
	Jumlah PENDAPATAN	**1.797.057.246,23**	**736.307.788,00**	**40,97**	**6.407.718.938,00**
9	**BELANJA**				
10	**BELANJA OPERASI**	**1.251.205.431,00**	**611.823.517,23**	**48,90**	**4.649.820.263,50**
11	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Barang dan Jasa	1.251.205.431,00	611.823.517,23	48,90	4.649.820.263,50
13	Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**BELANJA MODAL**	**545.851.815,23**	**73.804.497,00**	**13,52**	**1.935.948.033,84**
16	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Peralatan dan Mesin	545.851.815,23	73.804.497,00	13,52	1.531.956.220,84
18	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	92.846.813,00
20	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	311.145.000,00
21	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah BELANJA	**1.797.057.246,23**	**685.628.014,23**	**38,15**	**6.585.768.297,34**
	Surplus/ Defisit Sebelum Pembiayaan	**0,00**	**50.679.773,77**	**0,00**	**(178.049.359,34)**
22	**PENERIMAAN**				
23	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**0,00**	**634.996.295,23**	**0,00**	**813.045.654,57**
24	Penggunaan SILPA	0,00	634.996.295,23	0,00	813.045.654,57
25	Penerimaan dari Divestasi	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**0,00**	**634.996.295,23**	**0,00**	**813.045.654,57**
27	**PENGELUARAN**				
28	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembiayaan Neto	**0,00**	**634.996.295,23**	**0,00**	**813.045.654,57**
	Surplus/ Defisit	**0,00**	**685.676.069,00**	**0,00**	**634.996.295,23**

Tanjungpinang, 25 Mei 2026
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

SUEASNI, S.Pd., M.M.
NIP 196908121994122008

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 1 TANJUNG PINANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN**	**6.664.854.246,23**	**4.577.917.788,00**	**68,69**	**6.407.718.938,00**
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	1.707.632.246,23	684.552.300,00	40,09	986.983.938,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	87.000.000,00	45.600.000,00	52,41	0,00
6	Pendapatan Hibah	1.026.187.000,00	0,00	0,00	1.610.865.000,00
7	Pendapatan APBN/APBD	3.841.610.000,00	3.841.610.000,00	100,00	3.827.870.000,00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	2.425.000,00	6.155.488,00	253,83	0,00
	Jumlah PENDAPATAN	**6.664.854.246,23**	**4.577.917.788,00**	**68,69**	**6.407.718.938,00**
9	**BELANJA**				
10	**BELANJA OPERASI**	**3.341.820.761,00**	**2.674.838.847,23**	**80,04**	**4.649.820.263,50**
11	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Barang dan Jasa	3.341.820.761,00	2.674.838.847,23	80,04	4.649.820.263,50
13	Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**BELANJA MODAL**	**3.323.033.485,23**	**1.852.399.167,00**	**55,74**	**1.935.948.033,84**
16	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Peralatan dan Mesin	1.928.630.485,23	1.456.583.167,00	75,52	1.531.958.220,84
18	Belanja Gedung dan Bangunan	998.587.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	92.846.813,00
20	Belanja Aset Tetap Lainnya	395.816.000,00	395.816.000,00	100,00	311.145.000,00
21	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah BELANJA	**6.664.854.246,23**	**4.527.238.014,23**	**67,93**	**6.585.768.297,34**
	Surplus/ Defisit Sebelum Pembiayaan	**0,00**	**50.679.773,77**	**0,00**	**(178.049.359,34)**
22	**PENERIMAAN**				
23	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**0,00**	**634.996.295,23**	**0,00**	**813.045.654,57**
24	Penggunaan SILPA	0,00	634.996.295,23	0,00	813.045.654,57
25	Penerimaan dari Divestasi	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**0,00**	**634.996.295,23**	**0,00**	**813.045.654,57**
27	**PENGELUARAN**				
28	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembiayaan Neto	**0,00**	**634.996.295,23**	**0,00**	**813.045.654,57**
	Surplus/ Defisit	**0,00**	**685.676.069,00**	**0,00**	**634.996.295,23**

Tanjungpinang, 25 Mei 2026
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

SULASMI, S.Pd., M.M
NIP 196906121994122008

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 1 TANJUNG PINANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	**7.5.2.1**	634.996.295,23	813.045.654,57
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**7.5.2.2**	0,00	0,00
3	Subtotal (1-2)		634.996.295,23	813.045.654,57
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	**7.5.2.3**	50.679.773,77	(178.049.359,34)
5	Subtotal (3+4)		685.676.069,00	634.996.295,23
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	**7.5.2.6**	685.676.069,00	634.996.295,23

Tanjungpinang, 25 Mei 2026
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

SULASMI, S.Pd., M.M.
NIP 196908121994122008

PEMERINTAH KOTA KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 1 TANJUNG PINANG
NERACA (BLUD)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	**ASET**	**1.1.**	**12.846.321.102,42**	**12.052.044.392,21**
2	**ASET LANCAR**	**1.1.1.**	**681.330.869,00**	**634.996.295,23**
3	Kas di Bendahara Penerimaan	1.1.1.00.	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.1.1.01.	0,00	0,00
5	Kas di BLUD	1.1.1.02.	681.330.869,00	634.996.295,23
6	Kas Dana BOS	1.1.1.03.	0,00	0,00
7	Kas Dana P2SP	1.1.1.04.	0,00	0,00
8	Kas Lainnya Setara Kas	1.1.1.05.	0,00	0,00
9	Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan	1.1.1.06.	0,00	0,00
10	Piutang Pajak	1.1.1.07.	0,00	0,00
11	Piutang Retribusi	1.1.1.08.	0,00	0,00
12	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan	1.1.1.08.	0,00	0,00
13	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Ba	1.1.1.09.	0,00	0,00
14	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.1.10.	0,00	0,00
15	Belanja dibayar dimuka	1.1.1.11.	0,00	0,00
16	Piutang Lainnya	1.1.1.12.	0,00	0,00
17	Persediaan Badan Layanan Umum	1.1.1.13.	0,00	0,00
18	Aset Untuk Dikonsolidasikan	1.1.1.14.	0,00	0,00
	Jumlah ASET LANCAR		681.330.869,00	634.996.295,23
19	**ASET TETAP**	**1.1.2.**	**12.147.905.233,42**	**11.399.963.096,98**
20	Tanah	1.1.2.01.	2.666.200.000,00	2.665.200.000,00
21	Peralatan dan Mesin	1.1.2.02.	9.481.863.038,84	8.438.579.871,84
22	Gedung dan Bangunan	1.1.2.03.	3.928.200.980,00	2.929.613.980,00
23	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.1.2.04.	0,00	0,00
24	Aset Tetap Lainnya	1.1.2.05.	3.209.541.043,00	3.117.610.603,00
25	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.1.2.06.	0,00	0,00
26	Akumulasi Penyusutan	1.1.2.07.	(7.136.899.828,42)	(5.751.141.357,86)
	Jumlah ASET TETAP		12.147.905.233,42	11.399.963.096,98
27	**PIUTANG JANGKA PANJANG**	**1.1.3.**	**0,00**	**0,00**
28	Tagihan Penjualan Angsuran	1.1.3.01.	0,00	0,00
29	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	1.1.3.02.	0,00	0,00
30	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.3.03.	0,00	0,00
	Jumlah PIUTANG JANGKA PANJANG		0,00	0,00
31	**ASET LAINNYA**	**1.1.4.**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**
32	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.1.4.01.	0,00	0,00
33	Dana Kelolaan	1.1.4.02.	0,00	0,00
34	Aset yang dibatasi Penggunaannya	1.1.4.03.	0,00	0,00
35	Aset Tak Berwujud	1.1.4.04.	0,00	0,00
36	Aset Lain - Lain	1.1.4.05.	17.085.000,00	17.085.000,00
37	Akumulasi Amortisasi	1.1.4.06.	0,00	0,00
	Jumlah ASET LAINNYA		17.085.000,00	17.085.000,00
	JUMLAH ASET		12.846.321.102,42	12.052.044.392,21
38	**KEWAJIBAN**	**1.2.**	**0,00**	**0,00**
39	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**1.2.1.**	**0,00**	**0,00**
40	Utang Usaha	1.2.1.01.	0,00	0,00
41	Utang Pihak Ketiga	1.2.1.02.	0,00	0,00
42	Utang Pajak	1.2.1.03.	0,00	0,00
43	Utang Kepada KUN	1.2.1.04.	0,00	0,00
44	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.2.1.05.	0,00	0,00
45	Belanja yang masih harus dibayar	1.2.1.06.	0,00	0,00
46	Pendapatan Diterima Dimuka	1.2.1.07.	0,00	0,00
47	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.2.1.08.	0,00	0,00
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0,00	0,00
48	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**1.2.2.**	**0,00**	**0,00**
49	Utang Jangka Panjang	1.2.2.01.	0,00	0,00
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		0,00	0,00
50	**EKUITAS**	**1.3.**	**12.850.666.302,42**	**12.052.044.392,21**
51	**EKUITAS**	**1.3.1.**	**12.850.666.302,42**	**12.052.044.392,21**
52	Ekuitas	1.3.1.01.	12.850.666.302,42	12.052.044.392,21
	Jumlah EKUITAS		12.850.666.302,42	12.052.044.392,21
	JUMLAH EKUITAS		12.850.666.302,42	12.052.044.392,21
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		12.850.666.302,42	12.052.044.392,21

Tanjungpinang, 25 Mei 2026
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

SULASMI, S.Pd., M.M.
NIP 196908121994122008

PEMERINTAH KOTA KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 1 TANJUNG PINANG
LAPORAN OPERASIONAL (BLUD)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	**PENDAPATAN**				
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	684.552.300,00	968.983.938,00	(284.431.638,00)	(41,55)
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Enttas Akuntansi/ Enttas Pelaporan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama	45.600.000,00	0,00	45.600.000,00	100,00
5	Pendapatan Hibah	1.025.187.000,00	1.610.865.000,00	(584.678.000,00)	(56,98)
6	Pendapatan Usaha Lainnya	6.155.488,00	0,00	6.155.488,00	100,00
7	Pendapatan APBN/ APBD	3.841.610.000,00	3.827.670.000,00	13.740.000,00	0,36
	Jumlah PENDAPATAN	**5.604.104.788,00**	**6.407.718.938,00**	(803.614.150,00)	(14,34)
8	**BEBAN**				
9	Beban Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Beban Persediaan	1.709.326.903,23	2.461.534.011,87	(752.207.108,64)	(44,01)
11	Beban Jasa	348.204.971,00	1.528.266.883,60	(1.180.061.912,60)	(338,90)
12	Beban Pemeliharaan	4.660.000,00	106.464.366,03	(103.804.366,03)	(2.227,56)
13	Beban Langganan Daya dan Jasa	425.609.372,00	0,00	425.609.372,00	100,00
14	Beban Perjalanan Dinas	392.683.601,00	674.197.047,00	(281.513.446,00)	(71,69)
15	Beban Penyusutan Aset	1.385.758.470,56	1.196.524.221,86	189.234.248,70	13,66
16	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah BEBAN	**4.266.243.317,79**	**5.968.986.530,36**	(1.702.743.212,57)	(39,91)
	Surplus/Defisit Operasional	**1.337.861.470,21**	**438.732.407,64**	899.129.062,57	67,21
17	**KEGIATAN NON OPERASIONAL**				
18	Surplus/ Defisit Penjualan Aset Nonlancar	0,00	0,00	0,00	0,00
19	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	539.239.560,00	0,00	539.239.560,00	100,00
	Jumlah Surplus/Defisit Dari KEGIATAN NON OPERASIONAL	**539.239.560,00**	**0,00**	539.239.560,00	100,00
	Surplus/Defisit Sebelum POS LUAR BIASA	**798.621.910,21**	**438.732.407,64**	359.889.502,57	45,06
21	**POS LUAR BIASA**				
22	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah POS LUAR BIASA	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
	Surplus/Defisit-LO	**798.621.910,21**	**438.732.407,64**	359.889.502,57	45,06

Tanjungpinang, 25 Mei 2026
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

SULASMI, S.Pd., M.M.
NIP 196908121994122006

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 1 TANJUNG PINANG
LAPORAN ARUS KAS (BLUD)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	**Arus Masuk Kas**		
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	684.552.300,00	968.983.938,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	45.600.000,00	0,00
6	Pendapatan Hibah	0,00	1.610.865.000,00
7	Pendapatan APBN/APBD	3.841.610.000,00	3.827.870.000,00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	6.155.488,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	4.577.917.788,00	6.407.718.938,00
9	**Arus Keluar Kas**		
10	Pembayaran Pegawai	0,00	0,00
11	Pembayaran Barang dan Jasa	1.851.885.874,23	4.518.848.897,47
12	Pembayaran Pemeliharaan	4.660.000,00	130.501.366,03
13	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	425.609.372,00	0,00
14	Pembayaran Perjalanan Dinas	392.683.601,00	470.000,00
15	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	2.674.838.847,23	4.649.820.263,50
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi	1.903.078.940,77	1.757.898.674,50
16	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
17	**Arus Masuk Kas**		
18	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
19	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
20	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
21	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
22	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
23	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
24	Penerimaan dari Divestasi	0,00	0,00
25	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
26	**Arus Keluar Kas**		
27	Perolehan Tanah	0,00	0,00
28	Perolehan Peralatan dan Mesin	1.456.583.167,00	1.531.956.220,84
29	Perolehan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
30	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	92.848.813,00
31	Perolehan Aset Tetap Lainnya	395.816.000,00	311.145.000,00
32	Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
33	Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00
34	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	1.852.399.167,00	1.935.948.033,84
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(1.852.399.167,00)	(1.935.948.033,84)
35	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**		
36	**Arus Masuk Kas**		
37	Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00
38	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
39	**Arus Keluar Kas**		
40	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00
41	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00
42	Penyetoran ke Kas Negara	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
43	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**		
44	**Arus Masuk Kas**		
45	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
46	**Arus Keluar Kas**		
47	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
48	**Kenaikan/ Penurunan Kas BLU**	50.679.773,77	(178.049.359,34)
49	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLU**	634.996.295,23	813.045.654,57
50	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU**	685.676.069,00	634.996.295,23

Tanjungpinang, 25 Mei 2026
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

SULASMI, S.Pd., M.M.
NIP 196908121994122008

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 1 TANJUNG PINANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (BLUD)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Ekuitas Awal		12.052.044.392,21	11.613.311.984,57
2	Surplus/Defisit-LO		798.621.910,21	438.732.407,64
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		0,00	0,00
4	Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
6	Lain-lain		0,00	0,00
7	Ekuitas Akhir		**12.850.666.302,42**	**12.052.044.392,21**

Tanjungpinang, 25 Mei 2026
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

SULASMI, S.Pd., M.M.
NIP 196908121994122008







CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



bludskansatpi08@gmail.com

BAB I PENDAHULUAN

1.1 *Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan*

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Laporan Keuangan BLUD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran ;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan BLUD.
Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala BLUD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan BLUD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SMK Negeri 1 Tanjungpinang Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan RiauTahun 2025.
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang Tahun 2025, adalah tanggungjawab sepenuhnya BLUD SMK Negeri1 Tanjungpinang, dalam hal ini adalah Pimpinan BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang

1.4 Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri1 Tanjungpinang tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (*Subsequent Event*) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang tahun 2026. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2026.

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang
- 1.4 Periode Pelaporan Keuangan
- 1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Profil BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang
- 2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang
- 2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang tahun 2025

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Asumsi dasar Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- 4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja
- 4.7 Kebijakan Akuntansi Kas
- 4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan
- 4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- 4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban



Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
5.1 Laporan Realisasi Anggaran
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3 Neraca
5.4 Laporan Operasional
5.5 Laporan Arus Kas
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
5.7 Catatan Atas Laporan Keuangan
Bab VI Penjelasan atas informasi – Informasi non Keuangan
6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan
Bab VII Penutup

BAB II PROFIL
BLUD SMK NEGERI 1
TANJUNGPINANG

2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang

BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten serta tenaga ahli yang mendukung pelaksanaan *Teaching Factory (TEFA)*. SDM yang tersedia meliputi:

1. Tenaga Pendidik (Guru Produktif dan Normatif):
   - Guru bersertifikasi keahlian industri sesuai bidang kompetensi.
   - Guru mata pelajaran umum yang mendukung kurikulum berbasis kompetensi.
   - Instruktur dari dunia industri yang terlibat dalam program pelatihan siswa.
2. Tenaga Kependidikan:
   - Staf administrasi yang mengelola keuangan dan operasional BLUD.
   - Teknisi laboratorium dan bengkel untuk mendukung kegiatan praktik.
   - Tenaga keamanan dan kebersihan untuk menjaga lingkungan sekolah yang kondusif.
3. Kemitraan dengan Industri:
   - Mengundang praktisi industri sebagai instruktur tamu.
   - Menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk program magang dan penyerapan tenaga kerja.
   - Mengembangkan skema sertifikasi kompetensi yang diakui dunia usaha dan industri.

Sebagai SMK BLUD yang berbasis *Teaching Factory* (TEFA)), sekolah telah memiliki berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran berbasis produksi dan layanan industri, di antaranya:

1. Ruang Kelas dan Laboratorium:
   - Ruang kelas berbasis IT untuk pembelajaran teori.
   - Laboratorium komputer untuk simulasi bisnis digital dan desain grafis.
   - Perpustakaan digital sebagai pusat referensi dan literasi siswa.
2. Ruang TEFA:
   - Ruang TeFa Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL)
   - Ruang TeFa Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB)
   - Ruang TeFa Pemasaran
   - Ruang TeFa Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi
   - Ruang TeFa Desain Komunikasi Visual
   - Ruang TeFa Teknik Logistik
3. Fasilitas Pendukung:
   - Ruang Galeri Skansa Sebagai sarana pameran produk kreatif dan kewirausahaan
   - Ruang UKS sebagai sarana kesehatan sekolah

- Ruang OSIS sebagai sarana siswa dalam merencanakan dan mengelola kegiatan sekolah
- Ruang Ekstrakurikuler Seni Tari sebagai sarana siswa dalam mengembangkan minat dan bakat
- Ruang produksi kuliner sebagai sarana dalam memproduksi produk kreatif yang dihasilkan siswa
- Area publik seperti kantin sekolah yang dikelola oleh BLUD

Sebagai BLUD, SMK memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan Teaching Factory. Sumber dana sekolah berasal dari:

1. Dana BOS dan APBD:
   - Digunakan untuk operasional sekolah, gaji guru, serta pengadaan bahan ajar dan alat praktik.
2. Pendapatan dari Unit Usaha TEFA:
   - Hasil penjualan produk dari unit Teaching Factory.
   - Jasa layanan seperti servis otomotif, desain grafis, atau catering.
   - Kerjasama dengan industri dalam proyek tertentu.
3. Bantuan dari Pemerintah dan Swasta:
   - Hibah atau bantuan dari pemerintah untuk pengembangan kurikulum dan fasilitas.
   - Sponsor dari perusahaan yang mendukung pengembangan Teaching Factory.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang

Strategi dan kebijakan adalah merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis SMKN 1 Tanjungpinang 2026-2030 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Visi dan misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan kebijakan SMKN selama lima tahun periode Renstra 2026-2030. Strategi dirumuskan dengan menentukan langkah pilihan yang tepat melalui analisis metode SWOT.

Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis untuk dapat mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan, yaitu kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats), baik itu tujuan jangka pendek maupun pada jangka panjang. Analisis SWOT ini berperan penting karena tujuannya untuk membuat kerangka suatu situasi dan kondisi dalam suatu organisasi dari sudut pandang SWOT (Strenght, Weaknesses, Opportunities, Threats).

Berikut merupakan Analisis SWOT dari SMKN 1 Tanjungpinang:

1. **Kekuatan (Strength)**

1. Tersedianya pendanaan yang besar untuk pengembangan program-program layanan pendidikan beserta realisasinya, sejalan dengan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk

mengalokasikan 20% dari APBD, ditambah dengan pendanaan yang besar pula bersumber dari APBN

2. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh SMK Negeri 1 Tanjungpinang sangat memadai, dengan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan untuk menjalankan pekerjaan berdasarkan tupoksi organisasi, dilengkapi dengan kualifikasi akademik dan keterampilan yang sesuai bagi upaya pengembangan layanan pendidikan
3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sebagai faktor pendukung bagi pengembangan program-program layanan pendidikan
4. Tersedianya sarana pembelajaran berbasis produk (barang/jasa) melalui Teaching Factory pada semua kompetensi keahlian untuk menghasilkan tamatan yang kompeten sesuai kebutuhan industri
5. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan organisasi yang mampu menciptakan budaya kerja yang produktif dan iklim organisasi yang kondusif di lingkungan SMK Negeri 1 Tanjungpinang
6. Penguasaan dan penerapan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang mampu meningkatkan produktivitas sumber daya manusia di lingkungan SMK Negeri 1 Tanjungpinang.

2. Kelemahan (Weakneses)

1. Pemerataan penempatan dan alokasi sumber daya manusia pada berbagai Kompetensi keahlian masih kurang karena tidak ada penerimaan pegawai negeri sipil dan masih mengandalkan pendidik honorer atau pendidik tidak tetap, mengakibatk an adanya perbedaan produktivitas dan hasil kerja pada masing-masing kompetensi keahlian di lingkungan SMK Negeri 1 Tanjungpinang.
2. Intensitas komunikasi dan kerjasama antar kompetensi keahlian masih memerlukan peningkatan terutama terkait dengan implementasi program sekolah yang pelaksanaannya membutuhkan kejasama dan kebersamaan antar kompetensi keahlian
3. Pengembangan program kerja tahunan masih belum mengacu pada perencanaan strategis jangka menengah, mengakibatkan kontinuitas dan keberlanjutan program dari tahun ke tahun sesuai dengan rencana jangka menengah kurang tercapai dan mampu mengantisipasi perkembangan yang berlangsung di masyarakat;
4. Pada beberapa implementasi program masih dijumpai kekurangjelasan dan kekurangtegasan dalam pelimpahan wewenang dari tingkat pimpinan kepada bawalaan, serta kekurang sesuaian penunjukan bidang atau sub bagian untuk melaksanakan program-program kerja yang dilaksanakan
5. Masih ada ruang yang lokasi ruangnya, yaitu Ruang Tenaga Pendidik dilantai I dan tenaga Kependidikan (Tendik) di 1antai 2. Kondisi ini tentu berpengaruh pada efektivitas koordinasi dan peinberian layanan kepada tenaga pendidik dan kependidikan di SMK Negeri 1 Tanjungpinang.

3. Peluang (Opportunity)

1. Makin meningkatnya kebutuhan, kesadaran dan perhatian masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai faktor penentu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan harapan untuk meraih keberhasilan di masa depan
2. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Tanjungpinang, serta perkembangan sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat, menumbuhkembangkan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan pengetahuan dan keterampilan yang beragam, dan pada gilirannya meningkatkan perluasan kebutuhan akan jasa layanan pendidikan
3. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan, sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan akan pendidikan di kalangan masyarakat. Lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat makin meningkat keberagaman maupun kualitasnya
4. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak yang positif bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan di SMKN 1 Tanjungpinang. Berbagai riset dalam bidang pendidikan telah membawa peningkatan kualitas pendidikan melalui temuan-temuan inovatif dalam praktek pembelajaran. Selain itu pemanfaatan teknologi dalam praktek pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan

4. Ancaman

1. Tuntutan kebutuhan masyarakat atas layanan pendidikan baik dari sisi kuantitas dan kualitas yang makin meningkat, serta makin meningkatnya sikap kritis masyarakat atas berbagai kebijakan dan implementasi program-program pendidikan, memerlukan kepekaan untuk memahami dinamika perkembangan
2. Arah kebijakan yang kurang menentu dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengakibatkan banyak perubahan keputusan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, dan perkembangan serta implementasi program yang terkesan kurang mengacu pada perencanaan jangka menengah dan bersifat parsial kurang memiliki keterkaitan yang komprehensif dengan visi dan misi yang telah dikembangkan. Hal ini memerlukan fleksibilitas dan tanggapan yang cepat untuk memfasilitasi pelaksanaan nya di SMKN 1 Tanjungpinang, dan seringkali mengganggu kontinuitas implementasi program dan pelaksanaan kerja yang dikembangkan di SMKN 1 Tanjungpinang

Berdasarkan analisis SWOT disusunlah strategi dan arah kebijakan untuk setiap tujuan dan sasaran yang telah disusun dituangkan dalam tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
a. Meningkatkan kesejahteraan	a. Terwujudnya kesejahteraan	a. Meningkatkan kuantitas dan	a. Meningkatkan jumlah

masyarakat melalui pendidikan sebagai penjabaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam tahun 2021-2025 b. Mewujudkan keterpaduan salah satu visi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yaitu terwujudnya insan yang cerdas, kreatif berakhlak mulia dan berdaya saing regional dan global c. Penetapan visi, misi tujuan, sasaran dan strategi kebijakan SMKN 1 tanjungpinang, disertai dengan gambaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya	masyarakat melalui pendidikan b. Terwujudnya visi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yaitu terwujudnya insan yang cerdas, kreatif berakhlak mulia dan berdaya saing regional dan global c. Adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya	kualitas Sekolah Menengah Kejuruan b. Meningkatkan kuantitas tamatan yang mempunyai daya saing di IDUKA c. Meningkatkan kompetensi keahlian siswa yang mampu menjadi tenaga kerja trampil siap kerja, berwirausaha, ataupun melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi d. Meningkatkan potensi sekolah yang bernuansa industri melalui Teaching Factory pada semua kompetensi kahlian sebagai sarana pembelajaran berbasis produk (barang/jasa) untuk menghasilkan tamatan yang kompeten	kompetensi keahlian sebagai upaya penyediaan tenaga kerja b. Meningkatkan jumlah ruang pembelajaran umum sebagai upaya penambahan kompetensi keahlian c. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik untuk manghasilkan tamatan yang kompeten d. Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan sebagai upaya pelayanan pada tenaga pendidik dan siswa e. Meningkatkan keterserapan tamatan di IDUKA f. Meningkatkan kompetensi keahlian siswa melalui uji LSP g. Meningkatkan jumlah siswa yang berwirausaha h. Meningkatkan kompetensi siswa untuk melanjutkan ke jenjang yang

		sesuai kebutuhan industri e. Meningkatkan fungsi sekolah sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Terpadu (PPKT) kepada masyarakat f. Meningkatkan kualitas lingkungan yang aman, nyaman, indah dan kondusif	lebih tinggi melalui pendampingan BK i. Meningkatkan jumlah kompetensi keahlian yang pembelajaran berwirausahanya melalui Teaching Factory j. Meningkatkan jumlah fasilitas ruang pelatihan yang dimanfaatkan oleh masyarakat k. Meningkatkan jumlah kegiatan pelatihan bagi masyarakat l. Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau

2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi 1

2.1 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang

Tabel Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang

No	Unit Teaching Factory (TEFA)	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Keterangan
1	TEFA AKL SHOP DAN BANK MINI	Bahan Lainnya	5.197.500	2.414.000	46.45%	
		Natura dan Pakan-Natura	8.905.000	7.966.000	89.46%	
2	TEFA AGEN POS	Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.040.000	550.000	52.88%	
		Natura dan Pakan-Natura	2.592.000	1.007.079,19	38.85%	
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.129.000	3.401.161	47.71%	
3	TEFA JASPEN	Kantor-Alat Tulis Kantor	10.239.700	6.369.500	62.20%	
		Kantor-Kertas dan Cover	3.396.520	2.457.500	72.35%	
4	TEFA SBC	Natura dan Pakan-Natura	454.310.020	135.201.582,14	29.76%	
		Bahan-Bahan Lainnya	23.215.500	7.139.204	30.75%	
		Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	203.980	72.500	35.54%	
5	TEFA TKJ	-	-	-	-	
6	TEFA DKV	-	-	-	-	
7	UP PENYEWAAN	Modal Personal Computer	24.319.400	22.586.500	92.87%	
		Perjalanan Dinas Biasa	42.490.000	7.211.500	16.97%	
8	UP KANTIN AIR	Bahan-Bahan Baku	32.010.000	26.907.000	84.06%	
		Natura dan Pakan-Natura	19.405.000	13.545.200	69.80%	
		Bahan-Bahan Lainnya	7.488.000	3.490.000	46.61%	

No	Unit Teaching Factory (TEFA)	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Keterangan
		Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	57.373.500	49.766.500	86.74%	
		Modal Mebel	6.308.000	6.307.997	100%	
		Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000	1.800.000	50.00%	
		Perjalanan Dinas Biasa	11.393.000	9.709.800	85.23%	
9	UP KANTIN PKK	Bahan-Bahan Baku	5.016.000	1.242.000	24.76%	
		Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.040.000	800.000	76.92%	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.537.600	3.313.125	73.01%	
		Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	700.000	602.500	86.07%	
		Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	6.000.000	6.000.000	100%	
		Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.200.000	7.350.000	72.06%	
		Perjalanan Dinas Biasa	33.513.840	29.894.471	89.20%	
		Perjalanan Dinas Tetap	37.320.000	36.938.000	98.98%	
		Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.291.131	3.060.000	48.64%	
		Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	534.100	69.000	12.92%	
		Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	5.175.900	1.200.000	23.18%	

No	Unit Teaching Factory (TEFA)	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Keterangan
		Suvenir/Cendera Mata				
10	UP KANTIN SPW	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	46.271.900	40.796.304	88.17%	
		Natura dan Pakan-Natura	164.562.800	126.020.015,90	76.58%	
		Bahan-Bahan Lainnya	67.998.200	38.877.875	50.49%	
		Kantor-Perabot Kantor	16.698.500	4.317.500	25.86%	
		Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	28.339.000	27.810.000	98.13%	
10		Modal Alat Kantor Lainnya	17.100.000	17.100.000	100%	
		Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	20.850.000	20.550.000	98.56%	
		Belanja Sewa Alat Lainnya	5.430.000	4.345.200	80.02%	
		Perjalanan Dinas Biasa	8.251.000	5.954.000	72.16%	
11	PENDAPATAN JASA GIRO	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.000.000	935.000	93.50%	

2.2 Anggaran Dan Realisasi Program 1

BAB III
INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

3.1 *Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025* (contoh)

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja pada BLUD SMK, pada laporan keuangan ini digunakan sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat managemen yang digunakan untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran dan tujuan, untuk mewujudkan misi dan visi organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut akan disajikan data kinerja BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
A. Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa					
1	Persentase kelulusan siswa	100%	100%	100%	Mencapai target
2	Rata-rata nilai Ujian Kompetensi Keahlian (UKK)	≥ 80	85	106%	Mencapai target
3	Persentase siswa yang memperoleh sertifikasi kompetensi industri	100%	100%	100%	Mencapai target
4	Persentase lulusan yang bekerja sesuai kompetensi dalam 6 bulan	60%	57%	95%	Hampir mencapai target, perlu peningkatan kemitraan
5	Persentase lulusan yang berwirausaha	5%	4%	80%	Hampir mencapai target, perlu peningkatan program wirausaha
B. Kinerja Keuangan dan Unit Usaha BLUD					
6	Persentase pendapatan unit usaha BLUD	30%	28%	93%	Hampir mencapai target, strategi pemasaran perlu ditingkatkan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
	terhadap biaya operasional sekolah				
7	Efisiensi penggunaan dana BLUD sesuai rencana kerja	90%	95%	105%	Anggaran terserap dengan baik dan efektif
C. Kinerja Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)					
8	Jumlah kerja sama aktif dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	10 mitra	14 mitra	140%	Melebihi target, kerja sama dengan lebih banyak perusahaan
9	Persentase siswa yang menjalani magang industri	100%	100%	100%	Semua siswa telah menjalani magang
10	Jumlah produk atau jasa unggulan dari Teaching Factory (TEFA)	6 produk atau jasa	4 produk atau jasa	67%	Ada satu produk yang belum mencapai standar pasar
D. Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan					
11	Kepuasan siswa dan orang tua terhadap layanan pendidikan	85%	88%	103%	Melebihi target berdasarkan survei internal
12	Jumlah guru produktif bersertifikasi industri	100%	80%	80%	Hampir mencapai target, ada guru dalam proses sertifikasi

3.1 Indikator Kinerja dan Pencapaian 1

Berdasarkan tabel pencapaian, secara keseluruhan SMK BLUD telah mencapai rata-rata 98% dari target yang ditetapkan. Beberapa indikator bahkan melebihi target, seperti wirausaha lulusan, jumlah mitra industri, dan kepuasan siswa. Namun, ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, seperti pencapaian sertifikasi kompetensi siswa dan pengembangan produk Teaching Factory. Untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memperkuat kemitraan dengan industri untuk meningkatkan jumlah lulusan yang bekerja sesuai kompetensi.
2. Optimalisasi pemasaran unit usaha BLUD untuk meningkatkan pendapatan sekolah.
3. Meningkatkan kesiapan siswa dalam uji sertifikasi industri melalui bimbingan tambahan.
4. Pengembangan produk Teaching Factory agar lebih kompetitif di pasar.

Dengan perbaikan strategi ini, diharapkan SMK BLUD dapat mencapai 100% target di tahun mendatang.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Adapun hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target realisasi antara lain :

b. Hambatan dalam Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa
   1. Kurangnya kesiapan siswa dalam ujian sertifikasi industri
      - Tidak semua siswa memiliki kesiapan yang cukup untuk lulus uji sertifikasi.
      - Kurangnya akses terhadap bahan ajar atau simulasi ujian sesuai standar industri.
      - Biaya sertifikasi yang masih menjadi kendala bagi sebagian siswa.
   2. Tingkat kelulusan yang belum 100%
      - Beberapa siswa mengalami kesulitan dalam mata pelajaran teori maupun praktik.
      - Kurangnya motivasi belajar dan tingkat kehadiran siswa yang rendah.
   3. Penyerapan lulusan ke dunia kerja belum optimal
      - Persaingan ketat di dunia kerja sehingga tidak semua lulusan langsung terserap.
      - Kurangnya pengalaman praktis yang relevan dengan kebutuhan industri.
      - Masih ada lulusan yang lebih memilih bekerja di luar bidang keahlian mereka.

b. Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan dan Unit Usaha BLUD
   1. Pendapatan unit usaha BLUD belum mencapai target
      - Persaingan dengan produk atau jasa dari industri komersial yang lebih mapan.
      - Kurangnya strategi pemasaran dan branding produk/jasa SMK BLUD.
      - Keterbatasan modal untuk meningkatkan skala produksi dan inovasi produk.
   2. Efisiensi penggunaan dana BLUD
      - Masih ada beberapa program yang belum berjalan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas.
      - Keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah atau sumber pendanaan lain.

c. Hambatan dalam Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)
   1. Jumlah produk unggulan Teaching Factory belum optimal
      - Keterbatasan bahan baku atau alat produksi yang menyebabkan terhambatnya pengembangan produk baru.
      - Produk belum sepenuhnya sesuai standar pasar, sehingga masih butuh perbaikan dalam kualitas dan pemasaran.
   2. Kemitraan industri masih perlu diperluas
      - Tidak semua industri bersedia menerima siswa magang karena keterbatasan kapasitas mereka.
      - Kurangnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja.

d. Hambatan dalam Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan
   1. Tingkat kepuasan siswa dan orang tua belum maksimal



- Beberapa siswa merasa materi pembelajaran masih kurang relevan dengan dunia kerja.
- Orang tua belum sepenuhnya memahami konsep BLUD di SMK, sehingga kurang mendukung program sekolah.

2. Kurangnya jumlah guru bersertifikasi industri
   - Tidak semua guru memiliki kesempatan mengikuti pelatihan atau sertifikasi karena keterbatasan waktu dan biaya.
   - Masih ada kendala administratif dalam proses pengajuan sertifikasi guru ke lembaga industri terkait.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Akuntansi adalah BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

4.1 Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas;
b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau adalah:

a) ***Basis Kas*** untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam ***Laporan Realisasi Anggaran***
Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat Kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

b) ***Basis akrual*** untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam ***Neraca***
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

c) ***Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran*** berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riautidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

d) ***Basis akrual untuk neraca*** berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas;

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengakuan dan pengukuran atas transaksi kejadian ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan ini adalah:

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.
   Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD , adalah sebagai berikut:
   a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
   b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
   c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
   d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.
2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
   Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang tahun 2025, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

4.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat Diterima pada Rekening Kas Umum. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

4.5 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum untuk seluruh transaksi setelah dilakukan pengesahan definitif bendahara. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

4.6 Kebijakan Akuntansi Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas secara umum diakui jika memenuhi kriteria:

a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.

4.7 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dapat terdiri dari:

- Barang Konsumsi;
- Bahan untuk pemeliharaan;
- Suku cadang;
- Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
- Bahan baku;
- Barang dalam proses/setengah jadi;

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal; diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan

operasional. Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.

4.8 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.

4.9 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

BAB V RINCIAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang telah disusun BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini:

5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan – LRA

Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp 4.577.917.788,00 atau sebesar 68.69% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 6.664.854.246,23 sebagaimana ikhtisar sebagai berikut:

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.707.632.246,23	684.552.300,00	40,09	968.983.938,00
Pendapatan BLUD dari Hibah	1.026.187.000,00	0,00	0.00	1.610.865.000,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	87.000.000,00	45.600.000,00	52.41	-
Pendapatan BLUD dari APBD	3.841.610.000,00	3.841.610.000,00	100	3.827.870.00,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	2.425.000,00	6.155.488,00	253,83	-

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
TOTAL PENDAPATAN BLUD	**6.664.854.246,23**	**4.577.917.788,00**		

5.1 Pendapatan LRA

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Tahun 2025 sebesar Rp 684.552.300,00 atau 40.09% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp1.707.632.246,23 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Pendapatan TEFA Bank Mini Skansa dan AKL Shop	36.696.300	19.956.600	54.38%	49.709.800
Pendapatan TEFA Agen Pos	11.355.000	7.689.000	67.71%	77.751.800
Pendapatan TEFA Jasa Pengetikan	27.502.100	23.441.600	85.24%	13.630.000
Pendapatan TEFA SBC	343.028.751	188.071.000	54.83%	158.057.600
Pendapatan TEFA TKJ	-	-		-
Pendapatan TEFA DKV	-	-		339.000
Pendapatan UP Kantin Air	211.109.900	146.109.400	69.21 %	148.330.000
Pendapatan UP Kantin PKK	61.680.300	46.541.100	75.46%	43.405.300
Pendapatan UP Kantin SPW	381.263.600	252.743.600	66.29%	421.003.100
Pendapatan Koperasi	-	-	-	40.500
Pendapatan Silpa	634.996.295,23	-	-	-
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	**1.707.632.246,23**	**684.552.300**		**912.267.100**

5.1.1 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah Tahun 2025 sebesar Rp 0.00 atau 00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 0.00dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Hibah Revitalisasi	-	-	-	-
Hibah Afimarsi Pendidikan Menengah		--	-	-
Hibah SPP	-	-	-	1.160.865.000
Hibah Kementrian (Pengembangan SMK Industri 4.0)	-	-	-	150.000.000
Hibah Uji Sertifikasi Kompetensi LSP P1	-	-	-	300.000.000
Total Pendapatan BLUD dari Hibah	-	-	-	**1.610.865.000**

5.1.2 Pendapatan BLUD dari Hibah

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Tahun 2025 sebesar Rp45.600.000,00 atau 52,41% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp87.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Kerjasama Penyewaan	87.000.000	45.600.000	**52,41%**	-
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	**87.000.000**	**45.600.000**	**52,41%**	-

5.1.3 Pendapatan BLUD dari Kerjasama

iv) Pendapatan BLUD dari APBD/APBN

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD/APBN Tahun 2025 sebesar Rp3.841.610.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp3.841.610,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Dana BOSP	3.790.860.000	3.790.860.000	100%	3.827.870.000

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Dana BOSDA	50.750.000	50.750.000	100%	-
Total Pendapatan BLUD dari APBD	**3.841.610.000**	**3.841.610.000**	**100%**	**3.827.870.000**

5.1.4 Pendapatan BLUD dari APBD

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp 6.155.488,00 atau 253,83% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 2.425.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Pendapatan Jasa Giro	2.425.000	6.155.488	253,83%	-
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	**2.425.000**	**6.155.488**	**253,83%**	**-**

5.1.5 Pendapatan BLUD dari Lain Yang Sah

b. Belanja

1. Belanja Pegawai BLUD

Berupa Belanja Gaji & Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan BLUD dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0 % dari total anggaran belanja pegawai BLUD yang sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	-	-	-
Belanja Tambahan Penghasilan	-	-	-
Total Belanja Pegawai BLUD	-	-	-

5.1.6. Belanja Pegawai BLUD

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp 611.823.517,23 atau 48.90% dari total anggaran belanja barang dan jasa yang sebesar Rp 1.251.205.431,00 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Barang	947.754.820,00	474.456.885,23	50.06%
Belanja Jasa	138.861.200,00	34.898.861	25.13%
Belanja Pemeliharaan	17.821.571,00	3.610.000	20.26%
Belanja Perjalanan Dinas	146.767.840,00	98.857.771	67.36%
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Lain/Masyarakat	0.00	0.00	0%
Total Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.251.205.431,00	611.823.517,23	

5.1.7 Belanja Barang dan Jasa BLUD

3. Belanja Modal BLUD

Belanja modal BLUD terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp 73.804.497,00 atau 13.52% dari total anggaran belanja modal peralatan dan mesin yang sebesar Rp 545.851.815,23, belanja modal gedung dan bangunan yang terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0% dari total anggaran belanja modal gedung dan bangunan yang sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	545.851.815,23	73.804.497,00	13.52%	1.531.956.220,
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0%	-
Total Belanja Modal BLUD	**545.851.815,23**	**73.804.497,00**		

5.1.8 Belanja Modal BLUD

5.2 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) **Saldo Anggaran Lebih Awal**
   Saldo awal SAL pada tahun 2025 sebesar Rp 634.996.295,23 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

2) **Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**
   Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan digunakan dalam rangka membiayai defisit tahun anggaran berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 0 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

3) **Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA)**
SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SiLPA tahun 2025 sebesar Rp 685.676.069,00

5.3 Neraca

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
- Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- Berupa kas/setara kas dan persediaan

Aset Lancar sebesar Rp 685.676.069,00 yang dimiliki BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang per 31 Desember 2025 terdiri dari:

a. Kas di Bendahara BLUD

Kas BLUD adalah semua bentuk penerimaan dan pengeluaran uang tunai atau setara kas yang dikelola oleh SMK Negeri 1 Tanjungpinang dalam rangka menjalankan operasionalnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, dan pendapatan lainnya. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp 685.676.069,00 dengan rincian :

Uraian	Jumlah
Kas di Bank	
Rek Bank BRKS 1.030.100.089 (Pengeluaran)	60,00
Rek Bank BRKS 1.030.100.090 (Penerimaan)	17.911,00
Rek Bank BRKS 1.030.100.091 (Kas Blud)	685.658.098,00
Kas Tunai	0,00
Total Kas di Bendahara BLUD	685.676.069,00

5.3 Kas di Bendahara BLUD

b. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan kas dibawah pengelolaan bendahara BOS yang bersumber dari pemerintah untuk mendukung operasional sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan tanpa membebani peserta didik. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BOS sebesar RP 0,00 dengan rincian :

Uraian	Jumlah
Kas di Bank	
Rek Bank BRKS 1.033.800.387	-
Kas Tunai	-
Total Kas di Bendahara BOS	-

5.3.1 Kas Di Bendahara BOS

c. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 terdiri dari :

Uraian	Jumlah
Persediaan Barang Habis Pakai	-
- Bahan	-
- Suku Cadang	-
- Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor	-
Total Persediaan	-

5.3.2 Persediaan

2. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh pelayanan umum. Aset tetap sebesar Rp 12.147.905.233,42 per 31 Desember 2025 merupakan nilai perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan yang pengadaannya bersumber dari pengelolaan dana BOS dan BLUD.

a. Tanah

Nilai aset tanah BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.665.200.000,00 dan tidak terdapat penambahan aset tetap tanah selama tahun 2025.

b. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 9.481.863.038,84 meningkat sebesar Rp 1.043.183.167 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp 8.438.679.871,84 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**Rpxxxxx**
Penambahan :	
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 9.481.863.038,84
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rpxxxxx
- Reklasifikasi dari Aset Tetap xxxxx	Rpxxxxx
- Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kementerian xxx.....Dst	Rpxxxxx
Total Penambahan	**Rp 9.481.863.038,84**

Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel...Dst	
Total Pengurangan :	**Rpxxxxx**
Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**Rpxxxxx**

5.3.3 Peralatan Dan Mesin

c. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 3.928.200.980,00 meningkat sebesar Rp 998.587.000,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp 2.929.613.980,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**Rpxxxxx**
Penambahan :	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 3.928.200.980,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rpxxxxx
- Reklasifikasi dari Aset Tetap xxxxx	Rpxxxxx
- Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kementerian xxx.....Dst	Rpxxxxx
Total Penambahan	**Rp 3.928.200.980,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel...Dst	
Total Pengurangan :	**Rpxxxxx**
Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**Rpxxxxx**

5.3.4 Gedung dan Bangunan

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0.00 meningkat sebesar Rp 00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp 0.00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**Rpxxxxx**
Penambahan :	
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 0,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rpxxxxx
- Reklasifikasi dari Aset Tetap xxxxx	Rpxxxxx
- Hibah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kementerian xxx.....Dst	Rpxxxxx
Total Penambahan	**Rp 0,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel...Dst	
Total Pengurangan :	**Rpxxxxx**
Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**Rpxxxxx**

5.3.5 Jalan,Irigasi dan Jaringan

e. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Aset Tetap Lainnya BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.209.541.043,00 meningkat sebesar Rp 91.930.440,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp 3.117.610.603,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	**Rpxxxxx**
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 3.209.541.043,00

Uraian	Jumlah
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rpxxxxx
- Reklasifikasi dari Aset Tetap xxxxx	Rpxxxxx
- Hibah Aset Tetap Lainnya dari Kementerian xxx.....Dst	Rpxxxxx
Total Penambahan	**Rp 3.209.541.043,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Lainnya	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel...Dst	
Total Pengurangan :	**Rpxxxxx**
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya	**Rpxxxxx**

5.3.6 Aset Tetap Lainnya

3. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya dapat berupa Aset Tidak Berwujud dan Aset Rusak Berat/Tidak Digunakan Lagi dalam Operasional Kegiatan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang mencatat Aset Lainnya sebesar Rp 17.085.000,00 terdiri dari Aset Tidak Berwujud (Software, dll) sebesar Rpxx,00 dan Aset Rusak Berat/Tidak Digunakan Lagi dalam Operasional Kegiatan sebesar Rpxx,00. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Lainnya	**Rpxxxxx**
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Lainnya	Rpxxxxx
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rpxxxxx
- Reklasifikasi dari Aset Tetap xxxxx	Rpxxxxx
- Hibah Aset Lainnya dari Kementerian xxx.....Dst	Rpxxxxx
Total Penambahan	**Rpxxxxx**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Lainnya	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel...Dst	
Total Pengurangan :	**Rpxxxxx**
Saldo Akhir Aset Lainnya	**Rpxxxxx**

5.3.7 Aset Lainnya

4. Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang tidak memiliki kewajiban.

5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pada Tahun 2025 Ekuitas adalah sebesar Rp 12.052.044.392,21

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Ekuitas	**Rp12.052.044.392,21**
- Surplus/Defisit LO	Rp798.621.910,21
- Koreksi Ekuitas	Rpxxxxx
Saldo Ekuitas Akhir	**Rp12.850.666.302,42**

5.3.8 Ekuitas

5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional
b) Beban dari kegiatan operasional
c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
d) Pos luar biasa
e) Surplus/defisit LO

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional

Pendapatan LO dari kegiatan operasional terdiri dari :

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2025 sebesar Rp 684.552.300 lebih tinggi/rendah dari Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan TEFA Bank Mini Skansa dan AKL Shop	19.956.600	49.709.800		
Pendapatan TEFA Agen Pos	7.689.000	77.751.800		

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan TEFA Jasa Pengetikan	23.441.600	13.630.000		
Pendapatan TEFA SBC	188.071.000	158.057.600		
Pendapatan TEFA TKJ	-	0		
Pendapatan TEFA DKV	-	339.000		
Pendapatan UP Kantin Air	146.109.400	148.330.000		
Pendapatan UP Kantin PKK	46.541.100	43.405.300		
Pendapatan UP Kantin SPW	252.743.600	421.003.100		
Pendapatan Koperasi	-	40.500		
Total Pendapatan BLUD Dari Jasa Layanan LO	**684.552.300**	**912.267.100**		

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2025 sebesar Rp 1.026.187.000,00 lebih tinggi/rendah dari pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2024 sebesar Rp 1.610.865.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Hibah SPP	-	**1.160.865.000,00**	**100%**	
Hibah Kementerian (Pengembangan SMK Industri 4.0)	-	**150.000.000,00**	**100%**	
Hibah Uji Sertifikasi Kompetensi LSP P1	-	300.000.000,00	**100%**	
Hibah Revitalisasi	998.587.000,00		**100%**	

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Hibah Beasiswa ADEM	27.600.000,00		**100%**	
Total Pendapatan BLUD dari Hibah LO	**1.026.187.000,00**	**1.610.865.000,00**	**56.98%**	**(584.678.000,00)**

5.4.1 Pendapatan Jasa Layanan LO

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO Tahun 2025 sebesar Rp 45.600.000,00 lebih tinggi/rendah dari pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain sebesar Rp 49.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Kerjasama Penyewaan	**45.600.000,00**	-	**100%**	**45.600.000**
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO	**45.600.000,00**	-	**100%**	**45.600.000**

5.4.2 Pendapatan Kerjasama LO

iv) Pendapatan BLUD dari APBD/APBN LO

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD LO Tahun 2025 sebesar Rp 3.841.610,00 lebih tinggi/rendah dari pendapatan BLUD dari APBD LO sebesar Rp 3.827.870.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Dana BOSP	**3.790.860.000,00**	**3.827.870.000,00**	**0.97%**	**(37.010.000,00)**
Dana BOSDA	**50.750.000,00**	-	**100%**	**50.750.000,00**
Total Pendapatan BLUD dari APBD LO	**3.841.610.000,00**	**3.827.870.000,00**	0.36%	13.740.000,00

5.4.3 Pendapatan BLUD dari APBD LO

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2025 sebesar Rp 6.155.488,00 lebih tinggi/rendah dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2024 sebesar Rp 0 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Jasa Giro	6,155,488	0.00	100	6,155,488
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO	**6.155.488**	**0.00**	**100**	**6.155.488**

5.4.4 Pendapatan BLUD dari Lain Yang Sah

b) Beban dari kegiatan operasional

1. Belanja Pegawai BLUD LO

Berupa Beban Gaji & Tunjangan dan Beban Tambahan Penghasilan BLUD LO dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar
Rp 0 lebih tinggi/rendah dari beban pegawai BLUD LO tahun 2024 yang sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Gaji dan Tunjangan				
Beban Tambahan Penghasilan				
Dst...				
Total Beban Pegawai BLUD				

5.4.5 Belanja Pegawai LO

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Beban barang dan jasa LO tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 4.088.197.317,79 lebih tinggi/rendah dari dari Beban barang dan jasa LO tahun 2024 yang sebesar Rp6.480.451.655.29 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan
Beban Persediaan	1.709.326.903,23	2.461.534.011,87	44.01	(752.207.108,64)
Beban Jasa	348.204.971,00	1.528.266.883.60	338,90	(1.180.061.912,60)
Beban Pemeliharaan	4.660.000,00	108.464.366,03	2.227,56	(103.804.366,03)
Beban Langganan Daya dan Jasa	425.609.372,00	0,00	100	425.609.372,00
Beban Perjalanan Dinas	392.683.601,00	674.197.047,00	71.69	(281.513.446,00)
Beban Penyusutan Aset	1.385.758.470,56	1.196.524.221,86	13.66	189.234.248,70
Total Beban Barang dan Jasa BLUD	**4.266.243.317,79**	**5.968.986.530,36**	39.91	(1.702.743.212,57)

5.4.6 Belanja Barang dan Jasa LO

c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan dikelompokkan dalam kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang tahun 2025 sebesar Rp 539.239.560,00

d) Surplus/defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan beban. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang mencatat surplus/Defisit LO sebesar Rp 1.337.861.470,21

5.5 Laporan Arus Kas

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang pada Tahun 2025 sebesar Rp 5.604.104.788,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	**4.577.917.788,00**	**6.407.718.938,00**
Arus Masuk Kas	**4.577.917.788,00**	**6.407.718.938,00**
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	684.552.300,00	968.983.938,00
Pendapatan BLUD dari Hibah	0.00	1.610.865.000,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	45.600.000,00	0,00
Pendapatan BLUD dari APBD	3.841.610.000,00	3.827.870.000,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	6.155.488,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	**4.577.917.788,00**	**6.407.718.938,00**

5.5 Arus Masuk Kas Dari Operasi

b. Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang selama Tahun 2025 sebesar Rp 2.901.665.940,77 terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	**2.674.838.847,23**	**4.649.820.263,50**
Arus Masuk Kas	**4.577.917.788,00**	**6.407.718.938,00**
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang dan Jasa	1.851.885.874,23	4.518.848.897,47

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	**2.674.838.847,23**	**4.649.820.263,50**
Belanja Pemeliharaan	4.660.000,00	130.501.366,03
Belanja Perjalanan Dinas	392.683.601,00	470.000,00
Belanja Langganan Daya dan Jasa	425.609.372,00	0.00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	**2.674.838.847,23**	**4.649.820.263,50**

5.5.1 Arus Keluar Kas Dari Aktifitas

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp 2.901.665.940,77,00 Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.903.078.940,77	1.757.898.674,50

5.5.2 Jumlah Arus Kas Bersih

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset Non-Keuangan lainnya.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan di masa yang akan datang.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang pada Tahun 2025 sebesar Rp.00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan Aset Tetap Tanah	-	-
Penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	-	-
Penjualan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	-	-
Penjualan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-
Penjualan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	-	-

5.5.3 Arus Kas Masuk Investasi

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang pada Tahun 2025 sebesar Rpxx,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	**1.852.399.167,00**	**1.935.948.033,84**
Arus Masuk Kas	-	-
Belanja Modal Tanah	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.456.583.167,00	1.531.956.220,84
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0.00	92.846.813,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	395.816.000,00	311.145.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	**1.852.399.167,00**	**1.935.948.033,84**

5.5.4 Arus Kas Keluar Investasi

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp 1.852.399.167,00 Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(1.852.399.167,00)**	**(1.935.948.033,84)**

5.5.5 Jumlah Arus Kas Bersih Investasi

3) Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Periode 2025

Kenaikan/(penurunan) Kas Bersih Selama Periode Tahun 2025 merupakan akumulasi jumlah kenaikan/(penurunan) kas bersih dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris.

Selama Tahun Anggaran 2025 terjadi kenaikan/penurunan kas bersih sebesar Rp50.679.773,77 yang terdiri dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.903.078.940,77 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas

Investasi sebesar Rp 1.852.399.167,00 Perbandingan Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	50.679.773,77	178.049.359,34

5.5.6 Kenaikan dan Penurunan Kas Bersih

4) Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025

Saldo akhir kas per 31 Desember 2025 merupakan perhitungan Saldo Awal per 1 Januari 2025 ditambah (dikurangi) dengan kenaikan/ (penurunan) kas bersih selama periode tahun 2025.

Saldo akhir kas di BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang per 31 Desember 2025 sebesar Rp685.676.069,00 didapat dari perhitungan saldo awal Tahun 2025 sebesar Rp 634.996.295,23 ditambah kenaikan/penurunan kas bersih selama periode tahun 2025 sebesar Rp Rp50.679.773,77

Total Saldo Kas BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang Per 31 Desember 2025 sebesar Rp685.676.069,00 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas di BLUD	685.676.069,00	634.996.295,23
Kas Dana BOS	-	-
Saldo Akhir Kas	**685.676.069,00**	**634.996.295,23**

5.5.7 Saldo Akhir Kas

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

a) Ekuitas awal
b) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti:
   1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
   2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas Akhir

a) Ekuitas Awal

Pada Tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang mencatat ekuitas awal sebesar Rp12.052.044.392,21 yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada laporan Tahun 2025. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



- Jumlah Aset Tahun 2024 Rp 11.540.579.267,28
- Jumlah Kewajiban Tahun 2024 Rp 0,00
- **Saldo Awal Ekuitas 2024** **Rp 11.613.311.984,57**

b) Surplus/Defisit LO

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dalam Laporan Operasional Tahun 2025 tercatat sebesar Rp 798.621.910,21

c) Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar Rp 12.850.666.302,42 merupakan saldo kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Total Aset dan Total Kewajiban BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang Tahun 2025.

- Jumlah Aset Tahun 2025 Rp 12.846.321.102,42
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025 Rp 0,00
- **Saldo Awal Ekuitas 2025** **Rp 12.052.044.392,21**

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 1354 Tahun 2021

BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang beralamat di Jalan Pramuka No. 6, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau

6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nirlaba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di , dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang , sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun sebagai bentuk tanggung jawab BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, penyusunan laporan keuangan BLUD juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Secara umum pencapaian kinerja atas sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik, namun begitu masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang masih harus terus dibenahi dan menjadi perhatian oleh BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang

Dengan memperhatikan strategisnya peran sekolah dan besarnya tantangan yang dihadapi untuk mendukung Visi Misi Pendidikan Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, SMK Negeri 1 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja serta memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan industri. Melalui pendekatan berbasis kompetensi, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta pengelolaan keuangan yang transparan melalui sistem BLUD, sekolah ini berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan lulusan SMK dapat menjadi tenaga kerja yang unggul dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Akhir kata, BLUD SMK Negeri 1 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan dalam penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban kami dalam menyajikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

Tanjungpinang, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 1 Tanjungpinang
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sulasmi,S.Pd.,M.M
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 196908121994122008

LAPORAN KEUANGAN BLUD

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

SMK NEGERI 2 TANJUNGPINANG

TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)



DAFTAR ISI

Halaman
Daftar Isi i
Daftar Tabel..... ii
Daftar Lampiran iii
Kata Pengantar iv
Pernyataan Tanggungjawab v
LAPORAN KEUANGAN
Laporan Realisasi Anggaran vi
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih viii
Neraca ix
Laporan Operasional..... xi
Laporan Arus Kas xii
Laporan Perubahan Ekuitas.....xiv
Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan..... 2
1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 3
1.4 Periode Pelaporan Keuangan 3
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan..... 3
BAB II PROFIL BLUD SMK NEGERI 2 TANJUNGPINANG
2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang..... 5
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang..... 6
2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang 7
BAB III INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET
3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024 9
3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai dalam Pencapaian Target Realisasi 10
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Akuntansi 12
4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan..... 12
4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 12
4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 12
4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan..... 13
4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja..... 13
4.7 Kebijakan Akuntansi Kas 13
4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan 14
4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap 14
4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban 15
BAB V RINCIAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran 16
5.2 Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 19
5.3 Neraca 19
5.4 Laporan Operasional 24
5.5 Laporan Arus Kas..... 27
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas 30
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN
6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi 32
6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas 32
BAB VII PENUTUP 33

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel Anggaran dan Realisasi Program Kegiatan 7
Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target 9
Tabel Pendapatan – LRA 16
Tabel Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 17
Tabel Pendapatan BLUD dari Hibah 17
Tabel Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain 17
Tabel Pendapatan BLUD dari Dana Transfer Khusus/DAK 18
Tabel Pendapatan BLUD dari lain - lain 18
Tabel Belanja Pegawai BLUD 18
Tabel Belanja Barang dan Jasa 18
Tabel Belanja Modal BLUD 19
Tabel Kas di Bendahara BLUD 20
Tabel Kas di Bendahara BOS 20
Tabel Kas Persediaan 20
Tabel Peralatan dan Mesin 21
Tabel Gedung dan Bangunan 21
Tabel Jalan, Irigasi, dan Jaringan 22
Tabel Aset Tetap Lainnya 22
Tabel Aset Lainnya 23
Tabel Ekuitas 23
Tabel Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan – LO 24
Tabel Pendapatan BLUD dari Hibah – LO 24
Tabel Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama – LO 25
Tabel Pendapatan BLUD dari APBN – LO 25
Tabel Pendapatan BLUD dari Lain – Lain yang Sah – LO 25
Tabel Belanja Pegawai BLUD – LO 26
Tabel Belanja Barang dan Jasa BLUD – LO 26
Tabel Beban Penyusutan Aset BLUD – LO 26
Tabel Arus Kas dari Aktivitas Operasi 27
Tabel Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi 27
Tabel Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi 28
Tabel Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi 29
Tabel Kenaikan/Penurunan Kas Bersih 30
Tabel Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024 30

DAFTAR LAMPIRAN

1. Aset Tetap
2. Rekap BPH dan Persediaan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan keuangan BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu.

Laporan keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMK Negeri 2 Tanjungpinang dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan ini mencakup berbagai aspek keuangan, termasuk pendapatan, belanja, surplus/defisit, serta neraca keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan sekolah selama periode laporan.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan strategis, evaluasi kinerja keuangan, serta peningkatan tata kelola BLUD yang lebih profesional dan berkelanjutan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang selalu membimbing kami dalam proses penyusunan laporan keuangan ini termasuk tim manajemen sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, serta mitra industri yang mendukung program keahlian di SMK Negeri 2 Tanjungpinang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan dapat menjadi dasar untuk pengembangan SMK Negeri 2 Tanjungpinang sebagai sekolah berbasis BLUD yang profesional dan mandiri.

Tanjungpinang, 26 Mei 2026

Plt Pimpinan BLUD
SMK Negeri 2 Tanjungpinang
Provinsi Kepulauan Riau

Ramot Hutapea, S.Si.
NIP 197308062006041004

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan SMK Negeri 2 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (iii) Neraca; (iv) Laporan Operasional (LO); (v) Laporan Arus Kas (LAK); (vi) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (vii) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 26 Mei 2026

Plt Pimpinan BLUD
SMK Negeri 2 Tanjungpinang
Provinsi Kepulauan Riau



Ramot Hutapea, S.Si.
NIP 197308062006041004

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 2 TANJUNGPINANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**2,101,899,500.00**	**1,918,507,581.00**	**91.27**	**3,177,176,626.00**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**624,549,500.00**	**441,157,581.00**	**70.64**	**1,693,797,436.00**
4.1.02.	**Retribusi Daerah**	**20,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.02.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**20,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.02.02.06.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesenggrahan /Vila	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.	**Lain-lain PAD yang Sah**	**604,549,500.00**	**441,157,581.00**	**72.97**	**1,693,797,436.00**
4.1.04.16.	**Pendapatan BLUD**	**604,549,500.00**	**441,157,581.00**	**72.97**	**1,693,797,436.00**
4.1.04.16.02.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	377,935,000.00	394,057,100.00	104.27	238,002,351.00
4.1.04.16.03.	Pendapatan BLUD dari Hibah	100,750,000.00	0.00	0.00	1,429,505,936.00
4.1.04.16.04.	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	53,500,000.00	36,100,000.00	67.48	26,289,148.00
4.1.04.16.06.	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	72,364,500.00	11,000,481.00	15.20	0.00
4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1,477,350,000.00**	**1,477,350,000.00**	**100.00**	**1,483,379,193.00**
4.2.01.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1,477,350,000.00**	**1,477,350,000.00**	**100.00**	**1,483,379,193.00**
4.2.01.01.	**Dana Perimbangan**	**1,477,350,000.00**	**1,477,350,000.00**	**100.00**	**1,483,379,193.00**
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1,477,350,000.00	1,477,350,000.00	100.00	1,483,379,193.00
5.	**BELANJA DAERAH**	**2,258,607,174.00**	**1,881,506,418.00**	**83.30**	**3,467,242,133.00**
5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1,992,266,060.00**	**1,662,675,318.00**	**82.95**	**2,874,910,313.00**
5.1.02.	**Belanja Barang dan Jasa**	**1,992,266,060.00**	**1,662,675,318.00**	**82.95**	**2,874,910,313.00**
5.1.02.01.	**Belanja Barang**	**1,044,392,596.00**	**833,095,044.00**	**79.77**	**2,229,402,211.00**
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1,044,032,596.00	832,735,044.00	79.76	2,229,402,211.00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	360,000.00	360,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.	**Belanja Jasa**	**575,471,676.00**	**531,132,176.00**	**92.13**	**144,234,596.00**
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	545,902,676.00	503,603,176.00	92.25	123,624,596.00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11,069,000.00	9,779,000.00	88.35	1,410,000.00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15,500,000.00	14,750,000.00	89.39	19,000,000.00
5.1.02.03.	**Belanja Pemeliharaan**	**55,061,550.00**	**44,141,550.00**	**80.17**	**0.00**
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23,538,000.00	23,538,000.00	100.00	0.00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27,300,000.00	16,380,000.00	60.00	0.00
5.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4,223,550.00	4,223,550.00	100.00	0.00
5.1.02.04.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**316,340,238.00**	**244,306,548.00**	**77.23**	**501,273,506.00**
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	316,340,238.00	244,306,548.00	77.23	501,273,506.00
5.2.	**BELANJA MODAL**	**266,341,114.00**	**228,831,100.00**	**85.92**	**592,331,820.00**
5.2.02.	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**118,601,114.00**	**81,091,100.00**	**68.37**	**508,448,770.00**
5.2.02.05.	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**52,581,114.00**	**23,791,100.00**	**45.25**	**508,448,770.00**
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	0.00	0.00		326,719,970.00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	52,581,114.00	23,791,100.00	45.25	181,728,800.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
5.2.02.06.	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**	**2,800,000.00**	**2,800,000.00**	**100.00**	**0.00**
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	0.00
5.2.02.10.	**Belanja Modal Komputer**	**63,220,000.00**	**54,500,000.00**	**86.21**	**0.00**
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	59,000,000.00	51,000,000.00	86.44	0.00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	4,220,000.00	3,500,000.00	82.94	0.00
5.2.04.	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**0.00**	**0.00**		**40,283,050.00**
5.2.04.99.	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD**	**0.00**	**0.00**		**40,283,050.00**
5.2.04.99.99.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0.00	0.00		40,283,050.00
5.2.05.	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	**147,740,000.00**	**147,740,000.00**	**100.00**	**43,600,000.00**
5.2.05.01.	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan**	**147,740,000.00**	**147,740,000.00**	**100.00**	**0.00**
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	147,740,000.00	147,740,000.00	100.00	0.00
5.2.05.99.	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**	**0.00**	**0.00**		**43,600,000.00**
5.2.05.99.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0.00	0.00		43,600,000.00
	SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM PEMBIAYAAN	**(155,707,674.00)**	**37,001,163.00**	**7.97**	**(290,065,505.00)**

Tanjungpinang, 26 Mei 2026
Mengetahui
Plt.Pimpinan BLUD
SMK Negeri 2 Tanjungpinang

Rahmat Hulapee, S.Si
NIP 197308062006041004

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 2 TANJUNGPINANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	**7.5.2.1**	159,109,872.32	449,175,377.32
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**7.5.2.2**	0.00	0.00
3	Subtotal (1-2)		159,109,872.32	449,175,377.32
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	**7.5.2.3**	37,001,163.00	(290,065,505.00)
5	Subtotal (3+4)		196,111,035.32	159,109,872.32
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		(2,402,198.32)	0.00
7	Lain-lain		0.00	0.00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	**7.5.2.5**	193,708,837.00	159,109,872.32

Tanjungpinang, 26 Mei 2026
Mengetahui
Pj Pimpinan BLUD
SMK Negeri 2 Tanjungpinang

Ramot Hutagaol, S.Si
NIP 197308062006041004

PEMERINTAH KOTA KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 2 TANJUNGPINANG
NERACA (BLUD)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	**ASET**	**1.1.**	**7,923,497,786.18**	**8,544,842,617.04**
2	**ASET LANCAR**	**1.1.1.**	**229,396,797.00**	**159,109,872.32**
3	Kas di Bendahara Penerimaan	1.1.1.00.	0.00	0.00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.1.1.01.	0.00	0.00
5	Kas di BLUD	1.1.1.02.	193,708,837.00	156,707,674.00
6	Kas Dana BOS	1.1.1.03.	0.00	0.00
7	Kas Dana P2SP	1.1.1.04.	0.00	2,402,198.32
8	Kas Lainnya Setara Kas	1.1.1.05.	0.00	0.00
9	Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum	1.1.1.06.	0.00	0.00
10	Piutang Pajak	1.1.1.07.	0.00	0.00
11	Piutang Retribusi	1.1.1.08.	0.00	0.00
12	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.08.	0.00	0.00
13	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.09.	0.00	0.00
14	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.1.10.	0.00	0.00
15	Belanja dibayar dimuka	1.1.1.11.	0.00	0.00
16	Piutang Lainnya	1.1.1.12.	0.00	0.00
17	Persediaan Badan Layanan Umum	1.1.1.13.	35,686,960.00	0.00
18	Aset Untuk Dikonsolidasikan	1.1.1.14.	0.00	0.00
	Jumlah ASET LANCAR		229,396,797.00	159,109,872.32
19	**ASET TETAP**	**1.1.2.**	**7,649,314,989.18**	**8,340,945,744.72**
20	Tanah	1.1.2.01.	2,944,800,000.00	2,944,800,000.00
21	Peralatan dan Mesin	1.1.2.02.	3,261,071,759.00	3,183,771,759.00
22	Gedung dan Bangunan	1.1.2.03.	5,052,299,072.00	5,052,299,072.00
23	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.1.2.04.	0.00	0.00
24	Aset Tetap Lainnya	1.1.2.05.	656,761,693.00	521,021,693.00
25	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.1.2.06.	0.00	0.00
26	Akumulasi Penyusutan	1.1.2.07.	(4,277,617,534.82)	(3,360,946,779.28)
	Jumlah ASET TETAP		7,649,314,989.18	8,340,945,744.72
27	**PIUTANG JANGKA PANJANG**	**1.1.3.**	**0.00**	**0.00**
28	Tagihan Penjualan Angsuran	1.1.3.01.	0.00	0.00
29	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	1.1.3.02.	0.00	0.00
30	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.3.03.	0.00	0.00
	Jumlah PIUTANG JANGKA PANJANG		0.00	0.00
31	**ASET LAINNYA**	**1.1.4.**	**44,787,000.00**	**44,787,000.00**
32	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.1.4.01.	0.00	0.00
33	Dana Kelolaan	1.1.4.02.	0.00	0.00
34	Aset yang dibatasi Penggunaannya	1.1.4.03.	0.00	0.00

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
35	Aset Tak Berwujud	1.1.4.04.	0.00	0.00
36	Aset Lain - Lain	1.1.4.05.	44,787,000.00	44,787,000.00
37	Akumulasi Amortisasi	1.1.4.06.	0.00	0.00
	Jumlah ASET LAINNYA		44,787,000.00	44,787,000.00
	JUMLAH ASET		7,923,497,786.18	8,544,842,617.04
38	**KEWAJIBAN**	**1.2.**	**0.00**	**0.00**
39	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**1.2.1.**	**0.00**	**0.00**
40	Utang Usaha	1.2.1.01.	0.00	0.00
41	Utang Pihak Ketiga	1.2.1.02.	0.00	0.00
42	Utang Pajak	1.2.1.03.	0.00	0.00
43	Utang Kepada KUN	1.2.1.04.	0.00	0.00
44	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.2.1.05.	0.00	0.00
45	Belanja yang masih harus dibayar	1.2.1.06.	0.00	0.00
46	Pendapatan Diterima Dimuka	1.2.1.07.	0.00	0.00
47	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.2.1.08.	0.00	0.00
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0.00	0.00
48	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**1.2.2.**	**0.00**	**0.00**
49	Utang Jangka Panjang	1.2.2.01.	0.00	0.00
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0.00	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN		0.00	0.00
50	**EKUITAS**	**1.3.**	**7,923,497,786.18**	**8,544,842,617.04**
51	**EKUITAS**	**1.3.1.**	**7,923,497,786.18**	**8,544,842,617.04**
52	Ekuitas	1.3.1.01.	7,923,497,786.18	8,544,842,617.04
	Jumlah EKUITAS		7,923,497,786.18	8,544,842,617.04
	JUMLAH EKUITAS		7,923,497,786.18	8,544,842,617.04
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7,923,497,786.18	8,544,842,617.04

Tanjungpinang, 26 Mei 2026
Mengetahui
Plt Pimpinan BLUD
SMK Negeri 2 Tanjungpinang

Ramot Hutapea, S.Si
NIP.197308062006041004

PEMERINTAH KOTA KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 2 TANJUNGPINANG
LAPORAN OPERASIONAL (BLUD)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	394,057,100.00	238,002,351.00	156,054,749.00	39.60
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0.00	0.00	0.00	
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama	36,100,000.00	26,289,148.00	9,810,852.00	27.18
5	Pendapatan Hibah	100,750,000.00	1,429,505,936.00	(1,328,755,936.00)	(1,318.66)
6	Pendapatan Usaha Lainnya	11,000,481.00	0.00	11,000,481.00	100.00
7	Pendapatan APBN/ APBD	1,477,350,000.00	1,483,379,193.00	(6,029,193.00)	(0.41)
	Jumlah PENDAPATAN	**2,019,257,581.00**	**3,177,176,628.00**	(1,157,919,047.00)	(57.34)
8	BEBAN				
9	Beban Pegawai	0.00	0.00	0.00	
10	Beban Persediaan	840,278,184.00	1,157,834,255.00	(317,556,071.00)	(37.79)
11	Beban Jasa	307,207,597.00	929,979,551.00	(622,771,954.00)	(202.72)
12	Beban Pemeliharaan	44,141,550.00	38,821,000.00	5,320,550.00	12.05
13	Beban Langganan Daya dan Jasa	256,574,579.00	0.00	256,574,579.00	100.00
14	Beban Perjalanan Dinas	273,327,548.00	768,369,807.00	(495,042,259.00)	(181.12)
15	Beban Penyusutan Aset	916,670,755.54	356,085,028.28	560,585,727.26	61.15
16	Beban Bunga	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah BEBAN	**2,638,200,213.54**	**3,251,089,641.28**	(612,889,427.74)	(23.23)
	Surplus/Defisit Operasional	**(618,942,632.54)**	**(73,913,013.28)**	(545,029,619.26)	88.06
17	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
18	Surplus/ Defisit Penjualan Aset Nonlancar	0.00	0.00	0.00	
19	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	0.00	0.00	0.00	
20	Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah Surplus/Defisit Dari KEGIATAN NON OPERASIONAL	**0.00**	**0.00**	0.00	
	Surplus/Defisit Sebelum POS LUAR BIASA	**(618,942,632.54)**	**(73,913,013.28)**	(545,029,619.26)	88.06
21	POS LUAR BIASA				
22	Pendapatan Luar Biasa	0.00	0.00	0.00	
23	Beban Luar Biasa	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah POS LUAR BIASA	**0.00**	**0.00**	0.00	
	Surplus/Defisit-LO	**(618,942,632.54)**	**(73,913,013.28)**	(545,029,619.26)	88.06

Tanjungpinang, 26 Mei 2026
Mengetahui
Plt. Pimpinan BLUD
SMK Negeri 2 Tanjungpinang

Ramos Hutapea, S.Si
NIP. 197305062006041004

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 2 TANJUNGPINANG
LAPORAN ARUS KAS (BLUD)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	**Arus Masuk Kas**		
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	394,057,100.00	238,002,351.00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0.00	0.00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	36,100,000.00	36,289,148.00
6	Pendapatan Hibah	0.00	1,429,505,636.00
7	Pendapatan APBN/APBD	1,477,350,000.00	1,483,379,193.00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	11,000,481.00	0.00
	Jumlah Arus Masuk Kas	1,918,507,581.00	3,177,176,628.00
9	**Arus Keluar Kas**		
10	Pembayaran Pegawai	0.00	0.00
11	Pembayaran Barang dan Jasa	1,107,652,641.00	2,087,719,506.00
12	Pembayaran Pemeliharaan	44,141,550.00	38,821,000.00
13	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	256,574,579.00	0.00
14	Pembayaran Perjalanan Dinas	244,306,548.00	768,369,807.00
15	Pembayaran Bunga	0.00	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas	1,652,675,318.00	2,874,910,313.00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi	265,832,263.00	302,266,315.00
16	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
17	**Arus Masuk Kas**		
18	Penjualan atas Tanah	0.00	0.00
19	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0.00	0.00
20	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0.00	0.00
21	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00
22	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00
23	Penjualan Aset Lainnya	0.00	0.00
24	Penerimaan dari Divestasi	0.00	0.00
25	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0.00	0.00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0.00	0.00
26	**Arus Keluar Kas**		
27	Perolehan Tanah	0.00	0.00
28	Perolehan Peralatan dan Mesin	81,091,100.00	508,448,770.00

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
29	Perolehan Gedung dan Bangunan	0.00	0.00
30	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	40,283,050.00
31	Perolehan Aset Tetap Lainnya	147,740,000.00	43,600,000.00
32	Perolehan Aset Lainnya	0.00	0.00
33	Pengeluaran Penyertaan Modal	0.00	0.00
34	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0.00	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas	228,831,100.00	592,331,820.00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(228,831,100.00)	(592,331,820.00)
35	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**		
36	**Arus Masuk Kas**		
37	Penerimaan Pinjaman	0.00	0.00
38	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0.00	0.00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0.00	0.00
39	**Arus Keluar Kas**		
40	Pembayaran Pokok Pinjaman	0.00	0.00
41	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0.00	0.00
42	Penyetoran ke Kas Negara	2,402,198.32	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas	2,402,198.32	0.00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(2,402,198.32)	0.00
43	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**		
44	**Arus Masuk Kas**		
45	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	6,145,602.00	0.00
	Jumlah Arus Masuk Kas	6,145,602.00	0.00
46	**Arus Keluar Kas**		
47	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	6,145,602.00	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas	6,145,602.00	0.00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0.00	0.00
48	**Kenaikan/ Penurunan Kas BLU**	34,596,964.68	(290,065,505.00)
49	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLU**	159,109,872.32	449,175,377.32
50	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU**	193,706,837.00	159,109,872.32

Tanjungpinang, 26 Mei 2026

Mengetahui

PIt Pimpinan BLUD

SMK Negeri 2 Tanjungpinang

Ramot Hutapea, S.Si

NIP. 197308062006041004

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 2 TANJUNGPINANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (BLUD)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Ekuitas Awal		8,544,842,617.04	8,618,755,630.32
2	Surplus/Defisit-LO		(618,942,632.54)	(73,913,013.28)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		(2,402,188.32)	0.00
4	Koreksi Nilai Persediaan		0.00	0.00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		0.00	0.00
6	Lain-lain		(2,402,188.32)	0.00
7	Ekuitas Akhir		**7,923,497,796.18**	**8,544,842,617.04**

Tanjungpinang, 26 Mei 2026
Mengetahui
Plt. Pimpinan BLUD
SMK Negeri 2 Tanjungpinang

Ramot Hutapea, S.Si
NIP 197306062006041004



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Laporan Keuangan BLUD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran ;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan BLUD.
Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala BLUD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan BLUD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang Tahun 2025, adalah tanggungjawab sepenuhnya BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang, dalam hal ini adalah Pimpinan BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang

1.4 Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang tahun 2026, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (*Subsequent Event*) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang tahun 2025. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2026.

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang
- 1.4 Periode Pelaporan Keuangan
- 1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Profil BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang
- 2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang
- 2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang tahun 2025

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Asumsi dasar Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- 4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja
- 4.7 Kebijakan Akuntansi Kas
- 4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan
- 4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- 4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Neraca
- 5.4 Laporan Operasional
- 5.5 Laporan Arus Kas



5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
5.7 Catatan Atas Laporan Keuangan
Bab VI Penjelasan atas informasi – Informasi non Keuangan
6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan
Bab VII Penutup

BAB II

PROFIL BLUD SMK NEGERI 2 TANJUNGPINANG

2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang

BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten serta tenaga ahli yang mendukung pelaksanaan *Teaching Factory (TEFA).* SDM yang tersedia meliputi:

1. Tenaga Pendidik (Guru Produktif dan Normatif):
   - Guru bersertifikasi keahlian industri sesuai bidang kompetensi.
   - Guru mata pelajaran umum yang mendukung kurikulum berbasis kompetensi.
   - Instruktur dari dunia industri yang terlibat dalam program pelatihan siswa.
2. Tenaga Kependidikan:
   - Staf administrasi yang mengelola keuangan dan operasional BLUD.
   - Teknisi laboratorium dan bengkel untuk mendukung kegiatan praktik.
   - Tenaga keamanan dan kebersihan untuk menjaga lingkungan sekolah yang kondusif.
3. Kemitraan dengan Industri:
   - Mengundang praktisi industri sebagai instruktur tamu.
   - Menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk program magang dan penyerapan tenaga kerja.
   - Mengembangkan skema sertifikasi kompetensi yang diakui dunia usaha dan industri.

Sebagai SMK BLUD yang berbasis *Teaching Factory* (TEFA), sekolah telah memiliki berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran berbasis produksi dan layanan industri, di antaranya:

1. Ruang Kelas dan Laboratorium:
   - Ruang kelas berbasis IT untuk pembelajaran teori.
   - Laboratorium komputer untuk simulasi bisnis digital dan desain grafis.
   - Perpustakaan digital sebagai pusat referensi dan literasi siswa.
2. Workshop dan Bengkel TEFA:
   - Bengkel otomotif dengan peralatan servis kendaraan standar industri.
   - Dapur produksi kuliner yang dilengkapi dengan peralatan skala industri.
   - Studio desain dan multimedia untuk produksi konten digital dan video.
   - Workshop teknik bangunan untuk pelatihan konstruksi dan produksi material.
3. Fasilitas Pendukung:
   - Asrama atau tempat tinggal bagi siswa yang berasal dari luar daerah.
   - Ruang pemasaran produk hasil Teaching Factory.
   - Area publik seperti kantin dan koperasi sekolah yang dikelola oleh siswa.

Sebagai BLUD, SMK memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan Teaching Factory. Sumber dana sekolah berasal dari:

1. Dana BOS dan APBD

- Digunakan untuk operasional sekolah, gaji guru, serta pengadaan bahan ajar dan alat praktik.

2. Pendapatan dari Unit Usaha TEFA
   - Hasil penjualan produk dari unit Teaching Factory.
   - Jasa layanan seperti servis otomotif, desain grafis, atau catering.
   - Kerjasama dengan industri dalam proyek tertentu.
3. Bantuan dari Pemerintah dan Swasta
   - Hibah atau bantuan dari pemerintah untuk pengembangan kurikulum dan fasilitas.
   - Sponsor dari perusahaan yang mendukung pengembangan Teaching Factory.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang

A. Strategi Pengembangan BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang

1. Penguatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)
- Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan sertifikasi industri.
- Kerja sama dengan industri untuk menghadirkan tenaga ahli sebagai pengajar tamu.
- Meningkatkan keterampilan peserta didik melalui magang dan praktek industri.

2. Penguatan Kurikulum Berbasis Industri
- Menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja dan industri.
- Mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning) dengan kasus nyata di industri.
- Mendorong pembelajaran berbasis teknologi digital dan inovasi.

3. Optimalisasi Manajemen BLUD
- Mengembangkan unit usaha sekolah untuk meningkatkan kemandirian finansial.
- Mengelola keuangan secara transparan dan profesional sesuai prinsip BLUD.
- Menjalin kemitraan dengan industri dan pemerintah daerah untuk mendukung keberlanjutan program.

4. Penguatan Sarana dan Prasarana
- Penyediaan fasilitas praktik sesuai standar industri.
- Peningkatan sistem informasi dan digitalisasi layanan BLUD.
- Pengembangan laboratorium dan ruang praktik yang mendukung keahlian siswa.

B. Arah Kebijakan Per Program Keahlian

1. Usaha Layanan Pariwisata
- Membuka layanan tour guide dan agen perjalanan berbasis BLUD.
- Mengembangkan paket wisata edukasi berbasis budaya lokal.
- Membangun kerja sama dengan agen perjalanan dan Dinas Pariwisata.

2. **Perhotelan**
   - Mengelola ruang praktik perhotelan yang berfungsi sebagai unit bisnis.
   - Menjalin kerjasama dengan hotel berbintang untuk praktik dan rekrutmen lulusan.
   - Menyediakan layanan hospitality training untuk masyarakat umum.
3. **Kuliner**
   - Membangun bisnis kuliner sekolah berbasis BLUD (coffee shop and bakery, katering, produk kemasan).
   - Kerja sama dengan restoran dan hotel untuk praktik industri dan penyaluran kerja.
   - Mengembangkan inovasi produk makanan khas daerah sebagai branding sekolah.
4. **Kecantikan dan Spa**
   - Membuka layanan kecantikan dan spa komersial di lingkungan sekolah.
   - Menyelenggarakan pelatihan kecantikan untuk meningkatkan daya saing lulusan.
   - Berkolaborasi dengan industri kecantikan untuk sertifikasi siswa.
5. **Busana**
   - Mengembangkan usaha fashion dengan produksi pakaian seragam dan busana khas daerah.
   - Menyelenggarakan fashion show dan pameran hasil karya siswa.
   - Membuka butik sekolah sebagai wadah pemasaran produk siswa.

Dengan strategi ini, **SMK Negeri 2 Tanjungpinang** dapat menjadi SMK berbasis BLUD yang mandiri, inovatif, dan mampu mencetak lulusan siap kerja serta berwirausaha.

2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang

Tabel Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang

No	Unit Teaching Factory (TEFA)	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Ket
1	**TEFA Usaha Layanan Pariwisata**	Paket *Tour*	33.686.000,00	31.155.300,00	92,49	**Realisasi hampir sesuai anggaran**
2	**TEFA Perhotelan**	*Laundry*	14.514.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan praktik dari DANA BOS
3	**TEFA Kuliner**	*Pastry Bakery*	140.056.100,00	71.510.780,00	51,05	Belanja bahan praktik didukung dari DANA BOS
		Cookery	18.167.930,00	46.678.972,00	256,93	
		Cofffee Shop	23.037.000,00	69.966.144,00	303,71	

No	Unit Teaching Factory (TEFA)	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Ket
4	**Tefa Kecantikan dan Spa**	Salon Kecantikan	3.660.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan praktik dari DANA BOS
		Spa	2.021.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan praktik dari DANA BOS
5	**TEFA Busana**	Produksi Seragam Praktek Siswa	18.882.500,00	277.500,00	1,47	Belanja bahan praktik dari DANA BOS
		Tempah Jahit/Permak Perorangan	2.685.000,00	5.451.800,00	203,04	
6	**Pengembangan Usaha (Toko Selasih)**	Penjualan ATK/Peralatan Praktik	24.924.450,00	6.871.700,00	27,57	Tingkat penjualan yang rendah berdampak pada realisasi belanja
		Penjualan Makanan/Minuman	14.696.500,00	4.507.000,00	30,67	
		Lainnya	18.711.500,00	4.482.500,00	23,96	

BAB III

INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja pada BLUD SMK, pada laporan keuangan ini digunakan sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat managemen yang digunakan untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran dan tujuan, untuk mewujudkan misi dan visi organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut akan disajikan data kinerja BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
A. Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa					
1	Persentase kelulusan siswa	100%	100%	100%	Lulus seluruhnya
2	Rata-rata nilai Ujian Kompetensi Keahlian (UKK)	80	88	110%	Melebihi target
3	Persentase siswa yang memperoleh sertifikasi kompetensi industri	100%	100%	100%	Mencapai target
4	Persentase lulusan yang bekerja sesuai kompetensi dalam 6 bulan	60%	48%	80%	Belum mencapai target, perlu peningkatan kemitraan
5	Persentase lulusan yang berwirausaha	15%	16%	106%	Melebihi target, program wirausaha berjalan baik
B. Kinerja Keuangan dan Unit Usaha BLUD					
6	Persentase pendapatan unit usaha BLUD terhadap biaya operasional sekolah	25%	22%	88%	Hampir mencapai target, strategi pemasaran perlu ditingkatkan
7	Efisiensi penggunaan dana BLUD sesuai rencana kerja	90%	77%	86%	Anggaran cukup terserap dengan baik dan efektif
C. Kinerja Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)					
8	Jumlah kerjasama aktif dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	100 mitra	105 mitra	105%	Melebihi target, kerja sama dengan lebih banyak perusahaan
9	Persentase siswa yang menjalani magang industri	100%	100%	100%	Semua siswa telah menjalani magang
10	Jumlah produk atau jasa unggulan dari Teaching Factory (TEFA)	11 produk	11 produk	100%	Seluruh produk sudah mencapai standar pasar
D. Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan					
11	Kepuasan siswa dan orang tua terhadap layanan pendidikan	90%	90%	100%	Sudah mencapai target berdasarkan survei internal
12	Jumlah guru produktif bersertifikasi industri	85%	95%	112%	Melebihi target

Berdasarkan tabel pencapaian, secara keseluruhan SMK BLUD telah mencapai rata-rata 99% dari target yang ditetapkan. Beberapa indikator bahkan melebihi target, seperti rata-rata nilai Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) dan efisiensi penggunaan dana BLUD sesuai rencana kerja. Namun, ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, seperti jumlah peserta didik baru pada PPDB, jumlah lulusan yang bekerja sesuai kompetensi dalam 6 bulan, jumlah lulusan yang berwirausaha, dan proporsi pendapatan unit usaha BLUD terhadap biaya operasional sekolah. Untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memperkuat kemitraan dengan industri untuk meningkatkan jumlah lulusan yang bekerja sesuai kompetensi.
2. Optimalisasi pemasaran unit usaha BLUD untuk meningkatkan pendapatan sekolah.
3. Meningkatkan kesiapan siswa dalam uji sertifikasi industri melalui bimbingan tambahan.
4. Pengembangan produk Teaching Factory agar lebih kompetitif di pasar.

Dengan perbaikan strategi ini, diharapkan SMK BLUD dapat mencapai 100% target di tahun mendatang.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai dalam Pencapaian Target Realisasi

Adapun hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target realisasi antara lain :

b. Hambatan dalam Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa

1. Kurangnya kesiapan siswa dalam ujian sertifikasi industri
   - Tidak semua siswa memiliki kesiapan yang cukup untuk lulus uji sertifikasi.
   - Kurangnya akses terhadap bahan ajar atau simulasi ujian sesuai standar industri.
   - Biaya sertifikasi yang masih menjadi kendala bagi sebagian siswa.
2. Penyerapan lulusan ke dunia kerja belum optimal
   - Persaingan ketat di dunia kerja sehingga tidak semua lulusan langsung terserap.
   - Kurangnya pengalaman praktis yang relevan dengan kebutuhan industri.
   - Masih ada lulusan yang lebih memilih bekerja di luar bidang keahlian mereka.

b. Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan dan Unit Usaha BLUD

1. Pendapatan unit usaha BLUD belum mencapai target
   - Persaingan dengan produk atau jasa dari industri komersial yang lebih mapan.
   - Kurangnya strategi pemasaran dan branding produk/jasa SMK BLUD.
   - Keterbatasan modal untuk meningkatkan skala produksi dan inovasi produk.
2. Efisiensi penggunaan dana BLUD
   - Masih ada beberapa program yang belum berjalan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas.
   - Keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah atau sumber pendanaan lain.

c. Hambatan dalam Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)
   1. Jumlah produk unggulan Teaching Factory belum optimal
      - Keterbatasan bahan baku atau alat produksi yang menyebabkan terhambatnya pengembangan produk baru.
      - Produk belum sepenuhnya sesuai standar pasar, sehingga masih butuh perbaikan dalam kualitas dan pemasaran.
   2. Kemitraan industri masih perlu diperluas
      - Tidak semua industri bersedia menerima siswa magang karena keterbatasan kapasitas mereka.
      - Kurangnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja.

d. Hambatan dalam Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan
   1. Tingkat kepuasan siswa dan orang tua belum maksimal
      - Beberapa siswa merasa materi pembelajaran masih kurang relevan dengan dunia kerja.
      - Orang tua belum sepenuhnya memahami konsep BLUD di SMK, sehingga kurang mendukung program sekolah.
   2. Kurangnya jumlah guru bersertifikasi industri
      - Tidak semua guru memiliki kesempatan mengikuti pelatihan atau sertifikasi karena keterbatasan waktu dan biaya.
      - Masih ada kendala administratif dalam proses pengajuan sertifikasi guru ke lembaga industri terkait.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Akuntansi adalah BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas;
b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau adalah:

a) ***Basis Kas*** untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam ***Laporan Realisasi Anggaran***
Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat Kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

b) ***Basis akrual*** untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam ***Neraca***
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

c) ***Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran*** berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

d) ***Basis akrual untuk neraca*** berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas;

4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengakuan dan pengukuran atas transaksi kejadian ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan ini adalah:

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.
   Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut.

Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD , adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
b. Aset dicatat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut;
c. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang tahun 2025, telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat Diterima pada Rekening Kas Umum. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum untuk seluruh transaksi setelah dilakukan pengesahan definitif bendahara. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

4.7 Kebijakan Akuntansi Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang sangat likuid yang siap

dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas secara umum diakui jika memenuhi kriteria:

a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.

4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari:

- Barang Konsumsi;
- Bahan untuk pemeliharaan;
- Suku cadang;
- Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
- Bahan baku;
- Barang dalam proses/setengah jadi;

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal; diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.

4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.

4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

BAB V RINCIAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang telah disusun BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini:

5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan – LRA

Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.918.507.581,00 atau sebesar 91,27% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.101.899.500,00 sebagaimana ikhtisar sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan BLUD dari Retribusi Jasa Usaha	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	377.935.00,00	394.057.100,00	104,27	238.002.351,00
Pendapatan BLUD dari Hibah	100.750.000,00	0,00	0,00	1.429.505.936,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	53.500.000,00	36.100.000,00	67,48	26.289.148,00
Pendapatan BLUD dari Dana APBN/APBD (Transfer)	1.477.350.000,00	1.477.350.000,00	100,00	1.483.379.193,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	72.364.500,00	11.000.481,00	15,20	0.00
TOTAL PENDAPATAN BLUD	2.101.899.500,00	1.918.507.581,00	91,27	3.177.176.628,00

i) Retribusi daerah

Realisasi pendapatan BLUD dari retribusi daerah Tahun 2025 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 20.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pasang garahan/ Villa	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Total Pendapatan BLUD dari Retribusi Daerah	**20.000.000,00**	**0,00**	0,00	**0,00**

ii) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Tahun 2025 sebesar Rp. 394.057.100,00 atau 104,27% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 377.935.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan TEFA Program Keahlian Usaha Layanan Pariwisata	37.200.000,00	37.798.000,00	101,61	1.500.000,00
Pendapatan TEFA Program Keahlian Perhotelan	19.000.000,00	12.675.600,00	66,71	949.000,00
Pendapatan TEFA Program Keahlian Kuliner	270.000.000,00	287.093.500,00	106,33	184.162.440,00
Pendapatan TEFA Program Keahlian Kecantikan dan SPA	14.825.000,00	10.670.000,00	71,97	4.840.000,00
Pendapatan TEFA Program Keahlian Busana	36.910.000,00	45.820.000,00	124,14	19.465.000,00
Toko Selasih	0,00	0,00	0,00	27.085.911,00
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	**377.935.000,00**	**394.057.100,00**	**104,27**	**238.002.351,00**

iii) Pendapatan BLUD dari Hibah

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah Tahun 2025 sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.100.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Hibah SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Hibah Kementerian	100.750.000,00	0,00	0,00	1.429.505.936,00
Total Pendapatan BLUD dari Hibah	**100.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.429.505.936,00**

iv) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Tahun 2025 sebesar Rp. 36.100.000,00 atau 67,48% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 53.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Penyewaan Kantin	28.000.000,00	25.600.000,00	91,43	24.100.000,00
Penyewaan AULA/RPS	25.500.000,00	10.500.000,00	41,18	1.500.000,00

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	**53.500.000,00**	**36.100.000,00**	67,48	**25.600.000,00**

v) Pendapatan BLUD dari Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Realisasi pendapatan BLUD dari Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2025 sebesar Rp. 1,477,350,000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 1,477,350,000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Dana BOSP	1.477.350.000,00	1.477.350.000,00	100,00	1.483.379.193,00
Total Pendapatan BLUD dari APBD	1.477.350.000,00	1.477.350.000,00	100,00	1.483.379.193,00

vi) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp. 11.000.481,00 atau 15.20% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 72.364.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Pengembangan Usaha	71. 644.500,00	9.160.000,00	12,79	0,00
Jasa Giro	720.000,00	1.840.481,00	255,62	0,00
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	**72. 364.500,00**	**11.000.481,00**	15,20	**0,00**

b. Belanja

1. Belanja Pegawai BLUD

Berupa Belanja Gaji & Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan BLUD dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 % dari total anggaran belanja pegawai BLUD yang sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 1.652.675.318,00 atau 82,95% dari total anggaran belanja barang dan jasa yang sebesar Rp. 1.992.266.060,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang	1.044.392.596,00	833.095.044,00	79,77
Belanja Jasa	576.471.676,00	531.132.176,00	92,13
Belanja Pemeliharaan	55.061.550,00	44.141.550,00	80,17
Belanja Perjalanan Dinas	316.340.238,00	244.306.548,00	77,23
Total Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.992.266.060,00	1.652.675.318,00	82,95

3. Belanja Modal BLUD

Belanja modal BLUD terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp. 81.091.100,00 atau 68,37% dari total anggaran belanja modal peralatan dan mesin yang sebesar Rp. 118.601.114,00 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari total anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang sebesar Rp. 0,00, belanja modal aset tetap lainnya yang terealisasi sebesar Rp. 147.740.000,00 atau 100,00% dari total anggaran belanja modal aset tetap lainnya yang sebesar Rp. 147.740.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.601.114,00	81.091.100,00	68,37	508.448.770,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	40.283.050,00
Belanja aset tetap lainnya	147.740.000,00	147.740.000,00	100,00	43.600.000,00
Total Belanja Modal BLUD	266.341.114,00	228.831.100,00	85,92	592.331.820,00

5.2 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo awal SAL pada tahun 2025 sebesar Rp. 159.109.872,32 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

2) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan digunakan dalam rangka membiayai defisit tahun anggaran berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 0,00 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

3) Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SiLPA tahun 2025 sebesar Rp. 193.708.837,00

5.3 Neraca

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
- Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- Berupa kas/setara kas dan persediaan

Aset Lancar sebesar Rp. 229.395.797,00 yang dimiliki BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang per 31 Desember 2025 terdiri dari:

a. Kas di Bendahara BLUD

Kas BLUD adalah semua bentuk penerimaan dan pengeluaran uang tunai atau setara kas yang dikelola oleh SMK Negeri 2 Tanjungpinang dalam rangka menjalankan operasionalnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, dan pendapatan lainnya. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp 193.708.837,00, dengan rincian :

Uraian	Jumlah (Rp)
Kas di Bank	193.682.197,00
Rek Bank BRK (Bendahara Penerimaan) 103-01-00087	
Kas di Bank	17.222,00
Rek Bank BRK (Bendahara Penerimaan) 103-01-00087	
Kas di Bank	9.418,00
Rek Bank BRK (Bendahara Pengeluaran) 103-01-00088	
Kas Tunai	0,00
Total Kas di Bendahara BLUD	**193.708.837,00**

b. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan kas dibawah pengelolaan bendahara BOS yang bersumber dari pemerintah untuk mendukung operasional sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan tanpa membebani peserta didik. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp. 0,00 dengan rincian :

Uraian	Jumlah (Rp)
Kas di Bank	0,00
Rek Bank BRK 103-38-00388	
Kas Tunai	0,00
Total Kas di Bendahara BOS	**0,00**

c. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 35.686.960,00 terdiri dari :

Uraian	Jumlah (Rp)
Persediaan Barang Habis Pakai	35.686.960,00
Persediaan Barang Tidak Habis Pakai	0,00
Total Persediaan	**35.686.960,00**

2. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh pelayanan umum. Aset tetap sebesar Rp. 7.649.314.989,18 per 31 Desember 2025 merupakan nilai perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan yang pengadaannya bersumber dari pengelolaan dana BOS dan BLUD.

a. Tanah

Nilai aset tanah BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.944.800.000,00 dan tidak terdapat penambahan aset tetap tanah selama tahun 2025.

b. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 3.261.071.759,00 meningkat sebesar Rp. 77.300.000,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp. 3.183.771.759,00. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**3.183.771.759,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.091.100,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap ...	0,00
- Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kementerian	0,00
Total Penambahan	**81.091.100,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap ...	0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	3.791.100,00
Total Pengurangan :	**3.791.100,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**3.261.071.759,00**

c. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 5.052.299.072,00 meningkat sebesar Rp. -, jika dibandingkan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp 5.052.299.072,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**5.052.299.072,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap ...	0,00
- Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kementerian	0,00

Uraian	Jumlah (Rp)
Total Penambahan	**0,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap ...	0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	0,00
Total Pengurangan :	**0,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**5.052.299.072,00**

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 tidak ada peningkatan jika dibandingkan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp 0,00. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**0,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	**0,00**
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap ...	0,00
- Hibah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kementerian	0,00
Total Penambahan	**0,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap ...	0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	0,00
Total Pengurangan :	**0,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**0,00**

e. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Aset Tetap Lainnya BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 668.761.693,00 meningkat sebesar Rp. 147.740.000,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp 521.021.693,00. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	**521.021.693,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	147.740.000,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	0,00
- Hibah Aset Tetap Lainnya dari Kementerian	0,00
Total Penambahan	**147.740.000,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Lainnya	0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	0,00

Uraian	Jumlah (Rp)
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel … Dst	0,00
Total Pengurangan :	**0,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya	**668.761.693,00**

3. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya dapat berupa Aset Tidak Berwujud dan Aset Rusak Berat/Tidak Digunakan Lagi dalam Operasional Kegiatan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang mencatat Aset Lainnya sebesar Rp 44.787.000,00 terdiri dari Aset Lain-lain. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Aset Lainnya	**44.787.000,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Lainnya	0,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	0,00
- Hibah Aset Lainnya dari Kementerian	0,00
Total Penambahan	**0,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Lainnya	0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	0,00
Total Pengurangan :	**0,00**
Saldo Akhir Aset Lainnya	**44.787.000,00**

4. Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang memiliki kewajiban Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) sebesar Rp. 0,00 yang merupakan nilai pajak belanja yang belum disetor.

5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pada Tahun 2025 Ekuitas adalah sebesar Rp 7.923.497.786,18.

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Ekuitas	**8.544.842.617,04**

Uraian	Jumlah (Rp)
- Surplus/Defisit LO	(618.942.632,54)
- Koreksi Ekuitas	(2.402.198,32)
Saldo Ekuitas Akhir	**7.923.497.786,18**

5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional
b) Beban dari kegiatan operasional
c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
d) Pos luar biasa
e) Surplus/defisit LO

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional

Pendapatan LO dari kegiatan operasional terdiri dari :

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2025 sebesar Rp 394.057.100,00 lebih tinggi dari Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pendapatan TEFA Program Keahlian Kuliner	287.093.500,00	184.162.440,00	55,89	102.931.060,00
Pendapatan TEFA Program Keahlian Usaha Layanan Pariwisata	37.798.000,0	1.500.000,00	2419,87	36.298.000,00
Pendapatan TEFA Program Keahlian Perhotelan	12.675.600,00	949.000,00	1235,68	11.726.600,00
Pendapatan TEFA Program Keahlian Busana	45.820.000,000	19.465.000,0	135,40	26.355.000,00
Pendapatan TEFA Program Keahlian Kecantikan dan SPA	10.670.000,00	4.840.000,000	120,45	5.830.000,00
Toko Selasih	0,00	27.085.911,00	0,00	(27.085.911,00)
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO	**394.057.100,00**	**238.002.351,00**	86,83	156.054.749,00

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2025 sebesar Rp 100.750.000,00 lebih rendah dari pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2024 sebesar Rp.1.429.505.936,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Hibah SPP	0,00	379.505.936,00	(100,00)	(379.505.936,00)

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Hibah Kementerian	100.750.000,00	1.050.000.000,00	(90,40)	(949.250.000,00)
Total Pendapatan BLUD dari Hibah LO	**100.750.000,00**	**1.429.505.936,00**	**(92,95)**	**(1.328.755.936,00)**

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO Tahun 2025 sebesar Rp 36.100.000,00 lebih tinggi dari pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Tahun 2024 sebesar Rp 26.289.148,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Penyewaan Kantin	25.600.000,00	24.100.000,0	6,22	1.500.000,00
Penyewaan AULA/RPS	10.500.000,00	1.500.000,00	600,00	9.000.000,00
Jasa Giro	0,00	689.148,00	(100,00)	(689.148,00)
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO	**36.100.000,00**	**26.289.148,00**	37,32	**9.810.852,00**

iv) Pendapatan BLUD dari APBN LO

Realisasi pendapatan BLUD dari APBN LO Tahun 2025 sebesar Rp. 1.477.350.000,00 lebih rendah dari pendapatan BLUD dari APBN LO Tahun 2024 sebesar Rp.1.483.379.193,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dana BOSP	1.477.350.000,00	1.483.379.193,00	(0.41)	(6.029.193,00)
Total Pendapatan BLUD dari APBD LO	**1.477.350.000,00**	**1.483.379.193,00**	(0,41)	**(6.029.193,00)**

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2025 sebesar Rp 11.000.481,00 lebih rendah dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2024 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pengembangan Usaha	9.160.000,00	0,00	100,00	9.160.000,00
Jasa Giro	1.840.481,00	0,00	100,00	1.840.481,00
Total Pendapatan BLUD dari	**11.000.481,00**	**0,00**	**100,00**	**11.000.481,00**

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO				

b) Beban dari kegiatan operasional

1. Belanja Pegawai BLUD LO

Berupa Beban Gaji & Tunjangan dan Beban Tambahan Penghasilan BLUD LO dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp 0,00 sama besar dengan beban pegawai BLUD LO tahun 2024 yang sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Beban Pegawai BLUD	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Beban barang dan jasa LO tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 1.721.529.458,00 lebih rendah dari dari Beban barang dan jasa LO tahun 2024 yang sebesar Rp 2.895.004.613,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Persediaan	840.278.184,00	1.157.834.255,00	(27,43)	(317.556.071,00)
Beban Jasa	307.207.597,00	929.979.551,00	(66,97)	(622.771.954,00)
Beban Pemeliharaan	44.141.550,00	38.821.000,00	13,71	5.320.550,00
Beban Langganan Daya dan Jasa	256.574.579,00	0,00	100,00	256.574.579,00
Belanja Perjalanan Dinas	273.327.548,00	768.369.807,00	(64,43)	(495.042.259,00)
Total Beban Barang dan Jasa BLUD	1.721.529.458,00	2.895.004.613,00	(40,53)	(1.177.266.255)

3. Beban Penyusutan Aset BLUD LO

Berupa Beban Penyusutan Aset BLUD LO dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp 916.670.755,54,00 lebih tinggi dari beban penyusutan aset BLUD LO tahun 2024 yang sebesar Rp 356.085.028,28 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Beban Penyusutan	916.670.755,54	356.085.028,28	157,43	560.585.727,26
Total Beban Penyusutan BLUD	**916.670.755,54**	**356.085.028,28**	**157,43**	**560.585.727,26**

c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan dikelompokkan dalam kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang tahun 2025 sebesar Rp 0,00.

a) Surplus/defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan beban. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang mencatat Defisit LO sebesar Rp 618.942.632,54.

5.5 Laporan Arus Kas

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang pada Tahun 2025 sebesar Rp 1.918.507.581,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	394.057.100,00	238.002.351,00
Pendapatan BLUD dari Hibah	0,00	1.429.505.936,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	36.100.000,00	26.289.148,00
Pendapatan BLUD dari APBD/APBN	1.477.350.000,00	1.483.379.193,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	11.000.481,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	**1.918.507.581,00**	**3.177.176.628,00**

b. Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang selama Tahun 2025 sebesar Rp 1.652.675.318,00 terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Keluar Kas		
Belanja Pegawai	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	1.107.652.641,00	2.067.719.506,00
Belanja Langganan Daya dan Jasa	256.574.579,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	44.141.550,00	38.821.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	244.306.548,00	768.369.807,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	**1.652.675.318,00**	**2.874.910.313,00**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp. 265.832.263,00. Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	265.832.263,00	302.266.315,00

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset Non-Keuangan lainnya.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan di masa yang akan datang.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang pada Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan Aset Tetap Tanah	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		
Penjualan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	**0,00**	**0,00**

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang pada Tahun 2025 sebesar Rp 228.831.100,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.091.100,00	508.448.770,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	40.283.050,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	147.740.000,00	43.600.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	**228.831.100,00**	**592.331.820,00**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp (228.831.100,00). Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(228.831.100,00)	(592.331.820,00)

3) Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Periode 2025

Kenaikan/(penurunan) Kas Bersih Selama Periode Tahun 2025 merupakan akumulasi jumlah kenaikan/(penurunan) kas bersih dari

Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris.

Selama Tahun Anggaran 2025 terjadi kenaikan kas bersih sebesar Rp 34.598.964,68 yang terdiri dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp 265.832.263,00, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp (228.831.100,00), dan Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp (2.402.198,32). Perbandingan Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	34.598.964,68,00	(290.065.505,00)

4) Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025

Saldo akhir kas per 31 Desember 2025 merupakan perhitungan Saldo Awal per 1 Januari 2025 ditambah (dikurangi) dengan kenaikan/ (penurunan) kas bersih selama periode tahun 2025.

Saldo akhir kas di BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 193.708.837,00 didapat dari perhitungan saldo awal Tahun 2025 sebesar Rp 159.109.872,32 ditambah kenaikan kas bersih selama periode tahun 2025 sebesar Rp 34.598.964,68.

Total Saldo Kas BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang Per 31 Desember 2025 sebesar Rp 193.708.837,00 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024s (Rp)
Kas di BLUD	193.708.837,00	159.109.872,32
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	**193.708.837,00**	**159.109.872,32**

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

a) Ekuitas awal
b) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti:
   1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
   2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas Akhir

a) Ekuitas Awal

Pada Tahun 2025 BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang mencatat ekuitas awal sebesar Rp 8.544.842.617,04 yang merupakan selisih antara aset

dan kewajiban pemerintah daerah pada laporan Tahun 2024. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jumlah Aset Tahun 2024 Rp 8.544.842.617,04
- Jumlah Kewajiban Tahun 2024 Rp 0,00
- **Saldo Awal Ekuitas 2025** **Rp 8.544.842.617,04**

b) Surplus/Defisit LO

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dalam Laporan Operasional Tahun 2025 tercatat sebesar Rp (618.942.632,54).

c) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya pada periode bersangkutan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2025 tercatat sebesar Rp (2.402.198,32).

d) Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar Rp 7.923.497.786,18 merupakan saldo kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Total Aset dan Total Kewajiban BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang Tahun 2025.

- Jumlah Aset Tahun 2025 Rp 7.923.497.786,18
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025 Rp 0,00
- **Saldo Awal Ekuitas 2025** **Rp 7.923.497.786,18**

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 1354 Tahun 2021 Tentang Sekolah Menengah Kejuruan Pola Pengelolaan Keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang beralamat di Jalan Pramuka No. 1 Tanjungpinang.

6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nirlaba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun sebagai bentuk tanggung jawab BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, penyusunan laporan keuangan BLUD juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Secara umum pencapaian kinerja atas sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik, namun begitu masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang masih harus terus dibenahi dan menjadi perhatian oleh BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang

Dengan memperhatikan strategisnya peran sekolah dan besarnya tantangan yang dihadapi untuk mendukung Visi Misi Pendidikan Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, SMK Negeri 2 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja serta memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan industri. Melalui pendekatan berbasis kompetensi, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta pengelolaan keuangan yang transparan melalui sistem BLUD, sekolah ini berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan lulusan SMK dapat menjadi tenaga kerja yang unggul dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Akhir kata, BLUD SMK Negeri 2 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan dalam penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban kami dalam menyajikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

Tanjungpinang, 23 Februari 2026

PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 2 TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SUPINI, S.Pd
NIP 196604171990032006

LAMPIRAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B

Provinsi : PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kab./Kota : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Bidang : Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Unit : DINAS PENDIDIKAN
Organisasi
Sub Unit : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 TANJUNGPINANG
Organisasi

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk	Type	Bahan	Tahun Pem-belian	Asal usul	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)	Upload Foto Barang	Keterangan	Surat Pesanan		Faktur		BAST	
												Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1	3	5	6	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Laptop	ASUS	A1404V-17-1355U/16/1TB/SILVER	CERALUMINUM	2025	BLUD	2	15.500.000,00	31.000.000,00		BENDAHARA BLUD DAN KETUA JURUSAN KULINER	900/1.13.3/355/S	20/12/2025	419	24/12/202	900/1.13.	23/12/2025
2	Printer	BROTHER	DCP-T520W	PLASTIK ABS	2025	BLUD	1	3.500.000,00	3.500.000,00		LAB ULW	900/1.13.3/393/S	26/12/2025	332	29/12/292	900/1.13.	29/12/2025
3	KIPAS ANGIN	KRISBOW	12 INCH	PLASTIK ABS	2025	BLUD	1	899.900,00	899.900,00		COFEE SHOP	900/1.13.3/271/S	12/12/2025	385	15/12/202	900/1.13.	15/12/2025
4	MEJA LIPAT	TRAY LUNA	BLACK DAN TAN	BESI	2025	BLUD	5	178.440,00	892.200,00		COFEE SHOP	900/1.13.3/271/S	12/12/2025	385	15/12/202	900/1.13.	15/12/2025

5	KURSI LIPAT	RAPHAEL FOLDING CHAIR	BLACK DAN TAN	BESI	2026	BLUD	10	199.900,00	1.999.000,00		COFEE SHOP	900/1.13.3/271/S	12/12/2025	385	15/12/202	900/1.13.	15/12/2025	
TOTAL									**38.291.100,00**									

Mengetahui,
Pimpinan Blud **SMK Negeri 2 Tanjungpinang**

SUPIAN, S.Pd
NIP 196604171990032006

Tanjungpinang, 23 Februari 2026

PENGURUS BARANG

SRI ASTUTI, S.Pd
NIP 198208242009022002

BUKU PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS
JANUARI - DESEMBER 2025

SKPD : DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
SEKOLAH : SMK NEGERI 2 TANJUNGPINANG

PERIODE : JANUARI - DESEMBER 2025

NO		JENIS REKENING	NAMA BARANG	MEREK	PENERIMAAN					PENGELUARAN					SISA		
					Tanggal Terima	No/Tgl.Surat Dasar Penerimaan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Tanggal Keluar	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Peruntukan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
1		2	3	4	5	6	7	8	9 (7x8)	10	11	12	13 (11x12)	14	15	16	17
1	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	Baterai	Alkaline	04 November 2025	900/1.13.3/268/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	5	Rp 8.000,00	Rp 40.000,00	04-Nov-25	5	Rp 8.000,00	Rp 40.000,00	Kuliner/Coffee shop	0	Rp 8.000,00	Rp -
2	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	Baterai	ABC	18 Februari 2025	900/1.13.3/012/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	1	Rp 8.000,00	Rp 8.000,00	18-Feb-25	1	Rp 8.000,00	Rp 8.000,00	Kuliner/Coffee shop	0	Rp 8.000,00	Rp -
3	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	Baterai	Energizer	18 Februari 2025	900/1.13.3/012/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	1	Rp 17.000,00	Rp 17.000,00	18-Feb-25	1	Rp 17.000,00	Rp 17.000,00	Kuliner/Coffee shop	0	Rp 17.000,00	Rp -
4	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	Baterai	ABC	21 April 2025	900/1.13.3/045/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	1	Rp 18.000,00	Rp 18.000,00	21-Apr-25	1	Rp 18.000,00	Rp 18.000,00	Kuliner/Coffee shop	0	Rp 18.000,00	Rp -
5	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	Baterai	Alkaline	21 April 2025	900/1.13.3/046/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	1	Rp 17.000,00	Rp 17.000,00	21-Apr-25	1	Rp 17.000,00	Rp 17.000,00	Kuliner/Coffee shop	0	Rp 17.000,00	Rp -
6	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	Baterai	Energizer 2032	19 Mei 2025	900/1.13.3/073/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	1	Rp 8.000,00	Rp 8.000,00	19-May-25	1	Rp 8.000,00	Rp 8.000,00	Kuliner/Coffee shop	0	Rp 8.000,00	Rp -
7	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	Baterai	Alkaline	19 Mei 2025	900/1.13.3/073/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	1	Rp 17.000,00	Rp 17.000,00	19-May-25	1	Rp 17.000,00	Rp 17.000,00	Kuliner/Coffee shop	0	Rp 17.000,00	Rp -
8	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	Baterai	Alkaline AA 2's	27 Mei 2025	900/1.13.3/092/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	1	Rp 18.000,00	Rp 18.000,00	27-May-25	1	Rp 18.000,00	Rp 18.000,00	Kuliner/Coffee shop	0	Rp 18.000,00	Rp -
9	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	Baterai	Energizer	18 Juni 2025	900/1.13.3/113/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	1	Rp 16.800,00	Rp 16.800,00	18-Jun-25	1	Rp 16.800,00	Rp 16.800,00	Kuliner/Coffee shop	0	Rp 16.800,00	Rp -
10	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	Baterai	ABC Biru	05 Agustus 2025	900/1.13.3/149/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 5.600,00	Rp 5.600,00	05-Aug-25	1	Rp 5.600,00	Rp 5.600,00	Kuliner/Coffee shop	0	Rp 5.600,00	Rp -
12	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	Baterai	ABC Biru	26 Agustus 2025	900/1.13.3/171/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 5.600,00	Rp 28.000,00	26-Aug-25	5	Rp 5.600,00	Rp 28.000,00	Kuliner/Coffee shop	0	Rp 5.600,00	Rp -
									Rp 193.400,00				Rp 193.400,00			Rp -	
13	0027	Belanja Alat/Bahan Utk Kegiatan Kantor - Benda Pos	Materai 10.000	-	08 September 2025	-	8	Rp 12.000,00	Rp 96.000,00	08-Sep-25	8	Rp 12.000,00	Rp 96.000,00	Adm Keuangan	0	Rp 12.000,00	Rp -
14	0027	Belanja Alat/Bahan Utk Kegiatan Kantor - Benda Pos	Materai 10.000	-	20 Februari 2025	900/1.13.3/019/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	50	Rp 10.000,00	Rp 500.000,00	20-Feb-25	50	Rp 10.000,00	Rp 500.000,00	Toko Selasih	0	Rp 10.000,00	Rp -
15	0027	Belanja Alat/Bahan Utk Kegiatan Kantor - Benda Pos	Materai 10.000	-	20 Februari 2025	-	4	Rp 12.000,00	Rp 48.000,00	20-Feb-25	4	Rp 12.000,00	Rp 48.000,00	Adm Keuangan	0	Rp 12.000,00	Rp -
16	0027	Belanja Alat/Bahan Utk Kegiatan Kantor - Benda Pos	Materai 10.000	-	21 Mei 2025	900/1.13.3/080/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	50	Rp 10.000,00	Rp 500.000,00	21-May-25	50	Rp 10.000,00	Rp 500.000,00	Toko Selasih	0	Rp 10.000,00	Rp -
17	0027	Belanja Alat/Bahan Utk Kegiatan Kantor - Benda Pos	Materai 10.000	-	24 Desember 2025	900/1.13.3/353/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	100	Rp 10.000,00	Rp 1.000.000,00	24-Dec-25	0	Rp 10.000,00	Rp -	Toko Selasih	100	Rp 10.000,00	Rp 1.000.000,00
									Rp 2.144.000,00				Rp 1.144.000,00				Rp 1.000.000,00
18	0032	Belanja Alat/Bahan Utk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas	Jilbab Biasa	-	23 September 2025	900/1.13.3/209/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	25	Rp 35.000,00	Rp 875.000,00	23-Sep-25	25	Rp 35.000,00	Rp 875.000,00	Toko Selasih	0	Rp 35.000,00	Rp -
									Rp 875.000,00				Rp 875.000,00			Rp -	
19	0035	Belanja Alat/Bahan Utk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Ma	Logo dan Lokasi SMKN 2	-	08 Mei 2025	900/1.3.3/059/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	50	Rp 15.000,00	Rp 750.000,00	08-May-25	50	Rp 15.000,00	Rp 750.000,00	Toko Selasih	0	Rp 15.000,00	Rp -
20	0035	Belanja Alat/Bahan Utk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Ma	Logo/Lambang Kuliner	-	03 September 2025	900/1.3.3/187/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	100	Rp 2.775,00	Rp 277.500,00	03-Sep-25	100	Rp 2.775,00	Rp 277.500,00	Tefa Busana	0	Rp 2.775,00	Rp -
21	0035	Belanja Alat/Bahan Utk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Ma	Lambang Pramuka	-	20 September 2025	900/1.3.3/207/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	9	Rp 13.000,00	Rp 117.000,00	20-Sep-25	9	Rp 13.000,00	Rp 117.000,00	Toko Selasih	0	Rp 13.000,00	Rp -
22	0035	Belanja Alat/Bahan Utk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Ma	Jilbab Jumbo	-	23 September 2025	900/1.3.3/209/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 60.000,00	Rp 300.000,00	23-Sep-25	5	Rp 60.000,00	Rp 300.000,00	Toko Selasih	0	Rp 60.000,00	Rp -
									Rp 1.444.500,00				Rp 1.444.500,00				Rp -
23	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Caramel Sauce	DVC Caramel Sauce	18 Februari 2025	900/1.13.3/014/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	1	Rp 270.000,00	Rp 270.000,00	18-Feb-25	1	Rp 270.000,00	Rp 270.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 270.000,00	Rp -
24	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Cokelat Powder	Ponas Drink Dark Choco 500gr	18 Februari 2025	900/1.13.3/004/BAST-BLUDSMKN2TPI/20254	1	Rp 27.000,00	Rp 27.000,00	18-Feb-25	1	Rp 27.000,00	Rp 27.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 27.000,00	Rp -
25	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Matcha Powder	Ponas Drink Matcha Latte 500gr	18 Februari 2025	900/1.13.3/004/BAST-BLUDSMKN2TPI/20254	2	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00	18-Feb-25	2	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 25.000,00	Rp -
26	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Red Velvet Powder	Ponas Drink Red Velvet 500gr	18 Februari 2025	900/1.13.3/004/BAST-BLUDSMKN2TPI/20254	3	Rp 25.000,00	Rp 75.000,00	18-Feb-25	3	Rp 25.000,00	Rp 75.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 25.000,00	Rp -
27	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Air Galon Isi Ulang	Starqua	18 Februari 2025	900/1.13.3/018/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	16	Rp 6.000,00	Rp 96.000,00	18-Feb-25	16	Rp 6.000,00	Rp 96.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 6.000,00	Rp -
28	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Tissu Facial 250	Jolly Facial 250	22 Februari 2025	900/1.13.3/024/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 7.875,00	Rp 31.500,00	22-Feb-25	4	Rp 7.875,00	Rp 31.500,00	Toko Selasih	0	Rp 7.875,00	Rp -
29	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Tissu Facial 250	Jolly Facial 250	22 Februari 2025	900/1.13.3/024/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 8.200,00	Rp 8.200,00	22-Feb-25	1	Rp 8.200,00	Rp 8.200,00	Toko Selasih	0	Rp 8.200,00	Rp -
30	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Jus Orange	Jungle Juice Orange 1 lt	22 Februari 2025	900/1.13.3/024/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 24.900,00	Rp 24.900,00	22-Feb-25	1	Rp 24.900,00	Rp 24.900,00	Kuliner/ Coffee Shop	0	Rp 24.900,00	Rp -
31	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Jus Nanas	Jungle Juice PNP 1 lt	22 Februari 2025	900/1.13.3/006/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 24.900,00	Rp 24.900,00	22-Feb-25	1	Rp 24.900,00	Rp 24.900,00	Kuliner/ Coffee Shop	0	Rp 24.900,00	Rp -
32	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Kancing Hias	Kancing Hias	22 Februari 2025	900/1.13.3/006/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1,5	Rp 6.000,00	Rp 9.000,00	22-Feb-25	1,5	Rp 6.000,00	Rp 9.000,00	Toko Selasih	0	Rp 6.000,00	Rp -
33	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Kancing Kemeja	Kancing Kemeja	22 Februari 2025	900/1.13.3/006/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 2.000,00	Rp 6.000,00	22-Feb-25	3	Rp 2.000,00	Rp 6.000,00	Toko Selasih	0	Rp 2.000,00	Rp -
34	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Kantong Plastik	Kantong Plastik	22 Februari 2025	900/1.13.3/006/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 200,00	Rp 200,00	22-Feb-25	1	Rp 200,00	Rp 200,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 200,00	Rp -
35	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Jus Jeruk	Juice Jungle	21 April 2025	900/1.13.3/040/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 31.690,00	Rp 31.690,00	21-Apr-25	1	Rp 31.690,00	Rp 31.690,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 31.690,00	Rp -
36	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Kantong Gelas Bening 2 Cup	Kantong Gelas	21 April 2025	900/1.13.3/042/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	21-Apr-25	1	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 5.000,00	Rp -
37	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Kantong Gelas Bening 1 Cup	Kantong Gelas	21 April 2025	900/1.13.3/042/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	21-Apr-25	1	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 5.000,00	Rp -
38	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Mayonnaise	Maestro	22 April 2025	900/1.13.3/052/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	3	Rp 11.600,00	Rp 34.800,00	22-Apr-25	3	Rp 11.600,00	Rp 34.800,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 11.600,00	Rp -
39	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Air Galon	Star aqua	22 April 2025	900/1.13.3/151/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	20	Rp 6.000,00	Rp 120.000,00	22-Apr-25	20	Rp 6.000,00	Rp 120.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 6.000,00	Rp -
40	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Susu Bubuk 250gr	Susu Bubuk	22 April 2025	900/1.13.3/151/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	12	Rp 9.200,00	Rp 110.400,00	22-Apr-25	12	Rp 9.200,00	Rp 110.400,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 9.200,00	Rp -
41	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Mayonnaise	Maestro Mayonaise 1kg	09 Mei 2025	900/1.13.3/060/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 297.200,00	Rp 297.200,00	09-May-25	1	Rp 297.200,00	Rp 297.200,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 297.200,00	Rp -
42	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Mayonnaise	Maestro Mayonnaise 1 kg	09 Mei 2025	900/1.13.3/060/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 30.000,00	Rp 180.000,00	09-May-25	6	Rp 30.000,00	Rp 180.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 30.000,00	Rp -
43	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Minyak Goreng	Minyak Sunco Reff 2lt	09 Mei 2025	900/1.13.3/060/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 258.500,00	Rp 258.500,00	09-May-25	1	Rp 258.500,00	Rp 258.500,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 258.500,00	Rp -
44	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Susu Bubuk	Susu Bubuk 250gr	09 Mei 2025	900/1.13.3/060/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 11.500,00	Rp 115.000,00	09-May-25	10	Rp 11.500,00	Rp 115.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 11.500,00	Rp -
45	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Syrup Butterscoth	Syrup Butterscoth	09 Mei 2025	900/1.13.3/060/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 130.000,00	Rp 390.000,00	09-May-25	3	Rp 130.000,00	Rp 390.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 130.000,00	Rp -
46	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Krim Kocok	Whipping Cream 1 lt	09 Mei 2025	900/1.13.3/060/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 50.000,00	Rp 250.000,00	09-May-25	5	Rp 50.000,00	Rp 250.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 50.000,00	Rp -
47	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Krim Kocok	Whipping Cream Shine Road 1 Ltr	09 Mei 2025	900/1.13.3/060/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00	09-May-25	1	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 580.000,00	Rp -
48	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Krim Kocok	Whipping Cream Shine Road 1 Ltr	09 Mei 2025	900/1.13.3/060/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	8	Rp 52.000,00	Rp 416.000,00	09-May-25	8	Rp 52.000,00	Rp 416.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 52.000,00	Rp -
49	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Air Mineral	Starqua	19 Mei 2025	900/1.13.3/075/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	20	Rp 6.000,00	Rp 120.000,00	19-May-25	20	Rp 6.000,00	Rp 120.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 6.000,00	Rp -
50	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Cokelat Powder	IPAS Drink Dark Chocolate 500gr	19 Mei 2025	900/1.13.3/070/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 26.000,00	Rp 130.000,00	19-May-25	5	Rp 26.000,00	Rp 130.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 26.000,00	Rp -
51	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Matcha Powder	IPAS Drink Matcha Latte 500gr	19 Mei 2025	900/1.13.3/070/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 25.000,00	Rp 125.000,00	19-May-25	5	Rp 25.000,00	Rp 125.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 25.000,00	Rp -
52	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Red Velvet Powder	IPAS DRINK RED VELVET 500 Gr	19 Mei 2025	900/1.13.3/070/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 25.000,00	Rp 100.000,00	19-May-25	4	Rp 25.000,00	Rp 100.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 25.000,00	Rp -
53	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Red Velvet Powder	IPAS Drink Red Velvet 500gr	19 Mei 2025	900/1.13.3/070/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 25.000,00	Rp 100.000,00	19-May-25	4	Rp 25.000,00	Rp 100.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 25.000,00	Rp -
54	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Red Velvet Powder	IPAS Drink Red Velvet 500gr	19 Mei 2025	900/1.13.3/270/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 25.000,00	Rp 150.000,00	19-May-25	6	Rp 25.000,00	Rp 150.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 25.000,00	Rp -
55	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Jus Jeruk	Jungle Juice Orange	19 Mei 2025	900/1.13.3/071/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 31.690,00	Rp 158.450,00	19-May-25	5	Rp 31.690,00	Rp 158.450,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 31.690,00	Rp -
56	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Jus nenas	Jungle Juice PNP 1lt	19 Mei 2025	900/1.13.3/071/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 31.690,00	Rp 158.450,00	19-May-25	5	Rp 31.690,00	Rp 158.450,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 31.690,00	Rp -
57	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Syrup	Marjan Syrup 460 Mocca	19 Mei 2025	900/1.13.3/069/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 25.500,00	Rp 127.500,00	19-May-25	5	Rp 25.500,00	Rp 127.500,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 25.500,00	Rp -
58	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Syrup	Marjan Syrup 460 Strb	19 Mei 2025	900/1.13.3/069/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 25.500,00	Rp 127.500,00	19-May-25	5	Rp 25.500,00	Rp 127.500,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 25.500,00	Rp -
59	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Syrup	Marjan Syrup 460 Vanila	19 Mei 2025	900/1.13.3/069/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 25.500,00	Rp 127.500,00	19-May-25	5	Rp 25.500,00	Rp 127.500,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 25.500,00	Rp -
60	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Syrup	MARJAN SYRUP 460-VANILA	19 Mei 2025	900/1.13.3/069/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 25.500,00	Rp 255.000,00	19-May-25	10	Rp 25.500,00	Rp 255.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 25.500,00	Rp -
61	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Matcha Powder	Matcha Powder	19 Mei 2025	900/1.13.3/074/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 225.000,00	Rp 225.000,00	19-May-25	1	Rp 225.000,00	Rp 225.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 225.000,00	Rp -
62	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Matca Powder	MATCHA POWDER 4KG	19 Mei 2025	900/1.13.3/074/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 259.188,00	Rp 1.036.752,00	19-May-25	4	Rp 259.188,00	Rp 1.036.752,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 259.188,00	Rp -
63	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Caramel Sauce	Saos Caramel	19 Mei 2025	900/1.13.3/074/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 290.000,00	Rp 290.000,00	19-May-25	1	Rp 290.000,00	Rp 290.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 290.000,00	Rp -
64	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Caramel Sauce	SAUCE CARAMEL	19 Mei 2025	900/1.13.3/074/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 326.801,00	Rp 326.801,00	19-May-25	1	Rp 326.801,00	Rp 326.801,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 326.801,00	Rp -
65	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Caramel Sauce	Sauce Caramel	19 Mei 2025	900/1.13.3/074/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 290.000,00	Rp 290.000,00	19-May-25	1	Rp 290.000,00	Rp 290.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 290.000,00	Rp -
66	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Syrup Caramel	Syrup Caramel	19 Mei 2025	900/1.13.3/074/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 145.000,00	Rp 290.000,00	19-May-25	2	Rp 145.000,00	Rp 290.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 145.000,00	Rp -
67	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Bumbu Masak	Bumbu Masak	26 Mei 2025	900/1.13.3/090/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 5.500,00	Rp 5.500,00	26-May-25	1	Rp 5.500,00	Rp 5.500,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 5.500,00	Rp -
68	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	BUMBU MASAK	BUMBU MASAK	26 Mei 2025	900/1.13.3/090/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 22.501,00	Rp 22.501,00	26-May-25	1	Rp 22.501,00	Rp 22.501,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 22.501,00	Rp -
69	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	BUMBU MASAK	BUMBU MASAK	26 Mei 2025	900/1.13.3/090/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 4.300,00	Rp 8.600,00	26-May-25	2	Rp 4.300,00	Rp 8.600,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 4.300,00	Rp -
70	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Langkok	Langkok langkok	26 Mei 2025	900/1.13.3/090/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 1.000,00	Rp 5.000,00	26-May-25	5	Rp 1.000,00	Rp 5.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 1.000,00	Rp -
71	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Mayonnaise	Maestro Mayoinase 1kg	26 Mei 2025	900/1.13.3/090/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 297.200,00	Rp 297.200,00	26-May-25	1	Rp 297.200,00	Rp 297.200,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 297.200,00	Rp -
72	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Tempe	Tempe Ayu	26 Mei 2025	900/1.13.3/090/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 11.000,00	Rp 33.000,00	26-May-25	3	Rp 11.000,00	Rp 33.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 11.000,00	Rp -
73	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Tempe Daun	Tempe Daun	26 Mei 2025	900/1.13.3/090/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	12	Rp 5.000,00	Rp 60.000,00	26-May-25	12	Rp 5.000,00	Rp 60.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 5.000,00	Rp -
74	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Resleting Baju	-	27 Mei 2025	900/1.13.3/099/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	27-May-25	1	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Toko Selasih	0	Rp 25.000,00	Rp -
75	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Minyak Goreng	Minyak Sunco Reff 2ltr	27 Mei 2025	900/1.13.3/091/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 39.700,00	Rp 39.700,00	27-May-25	1	Rp 39.700,00	Rp 39.700,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 39.700,00	Rp -
76	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Penyedap Rasa Ayam 8gr	Penyedap Rasa Royco SHC Ayam 8gr	27 Mei 2025	900/1.13.3/199/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 5.100,00	Rp 5.100,00	27-May-25	1	Rp 5.100,00	Rp 5.100,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 5.100,00	Rp -
77	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Bumbu Giling	Bumbu Giling /Kg	17 Juni 2025	900/1.13.3/104/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 35.000,00	Rp 35.000,00	17-Jun-25	1	Rp 35.000,00	Rp 35.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 35.000,00	Rp -
78	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Bumbu Giling	Bumbu Giling /Kg	17 Juni 2025	900/1.13.3/104/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 35.000,00	Rp 70.000,00	17-Jun-25	2	Rp 35.000,00	Rp 70.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 35.000,00	Rp -
79	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	BUMBU GILING	BUMBU GILING 10/BKS	17 Juni 2025	900/1.13.3/104/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 10.000,00	Rp 20.000,00	17-Jun-25	2	Rp 10.000,00	Rp 20.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 10.000,00	Rp -
80	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	BUMBU MASAK	BUMBU MASAK	17 Juni 2025	900/1.13.3/104/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 2.000,00	Rp 2.000,00	17-Jun-25	1	Rp 2.000,00	Rp 2.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 2.000,00	Rp -
81	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Cabe Nano	Cabe Nano /Kg	17 Juni 2025	900/1.13.3/104/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,25	Rp 66.000,00	Rp 16.500,00	17-Jun-25	0,25	Rp 66.000,00	Rp 16.500,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 66.000,00	Rp -
82	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Cabe Rawit	Cabe Rawit /kg	17 Juni 2025	900/1.13.3/104/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,25	Rp 56.000,00	Rp 14.000,00	17-Jun-25	0,25	Rp 56.000,00	Rp 14.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 56.000,00	Rp -
83	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Cabe Rawit	Cabe Rawit /kg	17 Juni 2025	900/1.13.3/104/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,3	Rp 52.000,00	Rp 15.600

NO	JENIS REKENING	NAMA BARANG	MEREK	PENERIMAAN						PENGELUARAN						SISA			
				Tanggal Terima	No/Tgl.Surat Dasar Penerimaan	Jumlah Barang		Harga Satuan	Jumlah Harga	Tanggal Keluar	Jumlah Barang		Harga Satuan	Jumlah Harga	Peruntukan	Jumlah Barang		Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6	7		8	9 (7x8)	10	11		12	13 (11x12)	14	15		16	17
97	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Red velvet powder	IPAS Drink Red Velvet 500gr	18 Juni 2025	900/1.13.3/109/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp	29.299,49	Rp 117.198,00	18-Jun-25	4	Rp	29.299,49	Rp 117.198,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	29.299,49	Rp -
98	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Syrup Butterscoth	Butterscoth Syrup	18 Juni 2025	900/1.13.3/114/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp	130.000,00	Rp 390.000,00	18-Jun-25	3	Rp	130.000,00	Rp 390.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	130.000,00	Rp -
99	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Caramel sauce	Davinci Sauce Caramel	18 Juni 2025	900/1.13.3/114/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp	290.000,00	Rp 290.000,00	18-Jun-25	1	Rp	290.000,00	Rp 290.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	290.000,00	Rp -
100	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Caramel syrup	Davinci Syrup Caramel	18 Juni 2025	900/1.13.3/114/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp	145.000,00	Rp 435.000,00	18-Jun-25	3	Rp	145.000,00	Rp 435.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	145.000,00	Rp -
101	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Cokelat Syrup	Davinci White Coklat	18 Juni 2025	900/1.13.3/114/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp	145.000,00	Rp 145.000,00	18-Jun-25	1	Rp	145.000,00	Rp 145.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	145.000,00	Rp -
102	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	FRS SAYUR MAYUR	FRS SAYUR MAYUR	18 Juni 2025	900/1.13.3/114/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp	21.760,00	Rp 21.760,00	18-Jun-25	1	Rp	21.760,00	Rp 21.760,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	21.760,00	Rp -
103	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Jus nenas	Jungle Juice PNP 1lt	18 Juni 2025	900/1.13.3/116/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp	31.690,00	Rp 158.450,00	18-Jun-25	5	Rp	31.690,00	Rp 158.450,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	31.690,00	Rp -
104	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Vanilla Syrup	Marjan Buktoin Sirup Vanila 460	18 Juni 2025	900/1.13.3/113/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp	25.800,00	Rp 129.000,00	18-Jun-25	5	Rp	25.800,00	Rp 129.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	25.800,00	Rp -
105	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Sirup	Marjan Syrup 460 MOCCA	18 Juni 2025	900/1.13.3/110/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp	25.500,00	Rp 127.500,00	18-Jun-25	5	Rp	25.500,00	Rp 127.500,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	25.500,00	Rp -
106	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Sirup	Marjan Syrup 460 STRB	18 Juni 2025	900/1.13.3/110/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp	25.500,00	Rp 127.500,00	18-Jun-25	5	Rp	25.500,00	Rp 127.500,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	25.500,00	Rp -
107	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Air galon isi ulang	Air Isi Ulang	19 Juni 2025	900/1.13.3/121/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	20	Rp	6.000,00	Rp 120.000,00	19-Jun-25	20	Rp	6.000,00	Rp 120.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	6.000,00	Rp -
108	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	AIR MINUM	AIR MINUM	19 Juni 2025	900/1.13.3/217/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	30	Rp	6.000,00	Rp 180.000,00	19-Jun-25	30	Rp	6.000,00	Rp 180.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	6.000,00	Rp -
109	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Ajinomoto 90gr	Ajinomoto 90gr	19 Juni 2025	900/1.13.3/199/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp	4.800,00	Rp 9.600,00	19-Jun-25	2	Rp	4.800,00	Rp 9.600,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	4.800,00	Rp -
110	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Pasta	KP. Perisa Vanilla 20gr	28 Juli 2025	900/1.13.3/131/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp	7.100,00	Rp 28.400,00	28-Jul-25	4	Rp	7.100,00	Rp 28.400,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	7.100,00	Rp -
111	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Powder Chocolate	Powder Chocolate	28 Juli 2025	900/1.13.3/134/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp	150.000,00	Rp 150.000,00	28-Jul-25	1	Rp	150.000,00	Rp 150.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	150.000,00	Rp -
112	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Powder Matcha	Powder Matcha	28 Juli 2025	900/1.13.3/134/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp	210.000,00	Rp 210.000,00	28-Jul-25	1	Rp	210.000,00	Rp 210.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	210.000,00	Rp -
113	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Syrup Butterscoth	Syrup Butterscoth	28 Juli 2025	900/1.13.3/134/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp	130.000,00	Rp 390.000,00	28-Jul-25	3	Rp	130.000,00	Rp 390.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	130.000,00	Rp -
114	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Syrup Caramel	Syrup Caramel	28 Juli 2025	900/1.13.3/134/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp	145.000,00	Rp 435.000,00	28-Jul-25	3	Rp	145.000,00	Rp 435.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	145.000,00	Rp -
115	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Krim Kocok	Whipping Cream Shine Road 1 ltr	28 Juli 2025	900/1.13.3/131/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	8	Rp	52.000,00	Rp 416.000,00	28-Jul-25	8	Rp	52.000,00	Rp 416.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	52.000,00	Rp -
116	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Krim Kocok	Whipping Cream Shine Road 1ltr	30 Juli 2025	900/1.13.3/135/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	12	Rp	52.000,00	Rp 624.000,00	30-Jul-25	12	Rp	52.000,00	Rp 624.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	52.000,00	Rp -
117	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Choco Chip	Colatta Chip Comb	04 Agustus 2025	900/1.13.3/147/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp	80.000,00	Rp 80.000,00	04-Aug-25	1	Rp	80.000,00	Rp 80.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	80.000,00	Rp -
118	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Minyak Goreng	Sunco	19 Agustus 2025	900/1.13.3/161/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp	39.600,00	Rp 118.800,00	19-Aug-25	3	Rp	39.600,00	Rp 118.800,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	39.600,00	Rp -
119	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	MINYAK SUNCO REF 2 LTR	SUNCO	19 Agustus 2025	900/1.13.3/161/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp	39.300,00	Rp 39.300,00	19-Aug-25	1	Rp	39.300,00	Rp 39.300,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	39.300,00	Rp -
120	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Syrup	Caramel	26 Agustus 2025	900/1.13.3/161/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp	145.000,00	Rp 435.000,00	26-Aug-25	3	Rp	145.000,00	Rp 435.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	145.000,00	Rp -
121	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	SYRUP	CARAMEL SYRUP	26 Agustus 2025	900/1.13.3/161/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp	163.401,00	Rp 490.203,00	26-Aug-25	3	Rp	163.401,00	Rp 490.203,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	163.401,00	Rp -
122	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Ceker Ayam Segar	Ceker Ayam Segar	26 Agustus 2025	900/1.13.3/161/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp	30.000,00	Rp 180.000,00	26-Aug-25	6	Rp	30.000,00	Rp 180.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	30.000,00	Rp -
123	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Powder coklat	CHOCOLATE POWDER 4KG	26 Agustus 2025	900/1.3.3/215BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp	169.036,00	Rp 676.144,00	26-Aug-25	4	Rp	169.036,00	Rp 676.144,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	169.036,00	Rp -
124	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Air Minum Isi Ulang	Star aqua	26 Agustus 2025	900/1.13.3/172/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	27	Rp	6.000,00	Rp 162.000,00	26-Aug-25	27	Rp	6.000,00	Rp 162.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	6.000,00	Rp -
125	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Air Galon Isi Ulang	Star aqua	26 Agustus 2025	900/1.13.3/271/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	21	Rp	6.000,00	Rp 126.000,00	26-Aug-25	21	Rp	6.000,00	Rp 126.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	6.000,00	Rp -
126	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Resteling	Resleting Levis	03 September 2025	900/1.13.3/186/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	12	Rp	2.916,67	Rp 35.000,00	03-Sep-25	12	Rp	2.916,67	Rp 35.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	2.916,67	Rp -
127	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Oregano	Kp. Oregano Leaves 42gr	05 September 2025	900/1.13.3/189/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp	14.000,00	Rp 28.000,00	05-Sep-25	2	Rp	14.000,00	Rp 28.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	14.000,00	Rp -
128	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Bumbu Masak Serbuk	Adabi Sop Buntut 8gr	05 September 2025	900/1.13.3/189/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp	4.000,00	Rp 16.000,00	05-Sep-25	4	Rp	4.000,00	Rp 16.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	4.000,00	Rp -
129	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Saus	Saus Bolognese La Fonte	07 September 2025	900/1.13.3/192/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	20	Rp	18.890,00	Rp 377.800,00	07-Sep-25	20	Rp	18.890,00	Rp 377.800,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	18.890,00	Rp -
130	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Daging Ayam	Ayam Dada Fillet /kg	08 September 2025	900/1.13.3/194/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp	41.000,00	Rp 205.000,00	08-Sep-25	5	Rp	41.000,00	Rp 205.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	41.000,00	Rp -
131	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Karet Besar	Karet Besar /Pck 500gr	08 September 2025	900/1.13.3/195/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp	29.700,00	Rp 29.700,00	08-Sep-25	1	Rp	29.700,00	Rp 29.700,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	29.700,00	Rp -
132	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Keju	Keju Mozarella 250gr Perfeto	08 September 2025	900/1.13.3/195/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp	41.000,00	Rp 82.000,00	08-Sep-25	2	Rp	41.000,00	Rp 82.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	41.000,00	Rp -
133	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	BUMBU GILING	BUMBU GILING	15 September 2025	900/1.13.3/201/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp	1.000,00	Rp 5.000,00	15-Sep-25	5	Rp	1.000,00	Rp 5.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	1.000,00	Rp -
134	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	BUMBU GILING	BUMBU GILING	15 September 2025	900/1.13.3/201/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp	10.000,00	Rp 20.000,00	15-Sep-25	2	Rp	10.000,00	Rp 20.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	10.000,00	Rp -
135	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Cabe Merah	Cabe Merah	15 September 2025	900/1.13.3/201/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,3	Rp	44.000,00	Rp 13.200,00	15-Sep-25	0,3	Rp	44.000,00	Rp 13.200,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	44.000,00	Rp -
136	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Cabe Rawit	Cabe Rawit	15 September 2025	900/1.13.3/201/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,5	Rp	50.000,00	Rp 25.000,00	15-Sep-25	0,5	Rp	50.000,00	Rp 25.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	50.000,00	Rp -
137	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Cabe Rawit	Cabe Rawit	15 September 2025	900/1.13.3/201/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp	7.656,00	Rp 7.656,00	15-Sep-25	1	Rp	7.656,00	Rp 7.656,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	7.656,00	Rp -
138	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Cabe Rawit	Cabe Rawit	15 September 2025	900/1.13.3/201/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp	7.540,00	Rp 7.540,00	15-Sep-25	1	Rp	7.540,00	Rp 7.540,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	7.540,00	Rp -
139	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	CABE RAWIT	CABE RAWIT	15 September 2025	900/1.13.3/201/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,25	Rp	46.000,00	Rp 11.500,00	15-Sep-25	0,25	Rp	46.000,00	Rp 11.500,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	46.000,00	Rp -
140	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Daging ayam	Ayam Dada Fillet /Kg	15 September 2025	900/1.13.3/200/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp	42.000,00	Rp 42.000,00	15-Sep-25	1	Rp	42.000,00	Rp 42.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	42.000,00	Rp -
141	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	AYAM DRUMSTICK	AYAM DRUMSTICK	15 September 2025	900/1.13.3/200/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,57	Rp	46.000,00	Rp 26.220,00	15-Sep-25	0,57	Rp	46.000,00	Rp 26.220,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	46.000,00	Rp -
142	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	AYAM DRUMSTICK	AYAM DRUMSTICK	15 September 2025	900/1.13.3/200/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,43	Rp	46.000,00	Rp 19.550,00	15-Sep-25	0,43	Rp	46.000,00	Rp 19.550,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	46.000,00	Rp -
143	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	AYAM DRUMSTICK	AYAM DRUMSTICK	15 September 2025	900/1.13.3/200/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,57	Rp	46.000,00	Rp 26.220,00	15-Sep-25	0,57	Rp	46.000,00	Rp 26.220,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	46.000,00	Rp -
144	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	AYAM DRUMSTICK	AYAM DRUMSTICK	15 September 2025	900/1.13.3/200/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,57	Rp	46.000,00	Rp 26.220,00	15-Sep-25	0,57	Rp	46.000,00	Rp 26.220,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	46.000,00	Rp -
145	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	AYAM DRUMSTICK	AYAM DRUMSTICK	15 September 2025	900/1.13.3/200/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,61	Rp	46.000,00	Rp 27.830,00	15-Sep-25	0,61	Rp	46.000,00	Rp 27.830,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	46.000,00	Rp -
146	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	AYAM DRUMSTICK	AYAM DRUMSTICK	15 September 2025	900/1.13.3/200/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp	12.200,00	Rp 12.200,00	15-Sep-25	1	Rp	12.200,00	Rp 12.200,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	12.200,00	Rp -
147	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Bendera Box Fullcream	Bendera Box Fullcream	15 September 2025	900/1.13.3/200/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp	17.640,00	Rp 17.640,00	15-Sep-25	1	Rp	17.640,00	Rp 17.640,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	17.640,00	Rp -
148	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Kain Katun Motif	Kain Katun Motif (Abadi)	17 September 2025	900/1.13.3/204/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp	40.000,00	Rp 160.000,00	17-Sep-25	4	Rp	40.000,00	Rp 160.000,00	Tefa Busana	0	Rp	40.000,00	Rp -
149	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Kancing	Kancing Kemeja Hitam	17 September 2025	900/1.13.3/205/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp	15.000,00	Rp 30.000,00	17-Sep-25	2	Rp	15.000,00	Rp 30.000,00	Tefa Busana	0	Rp	15.000,00	Rp -
150	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Kancing	Kancing Sapari Besar	17 September 2025	900/1.13.3/205/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp	50.000,00	Rp 250.000,00	17-Sep-25	5	Rp	50.000,00	Rp 250.000,00	Tefa Busana	0	Rp	50.000,00	Rp -
151	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Kancing	Kancing Sapari Kecil	17 September 2025	900/1.13.3/205/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp	35.000,00	Rp 70.000,00	17-Sep-25	2	Rp	35.000,00	Rp 70.000,00	Tefa Busana	0	Rp	35.000,00	Rp -
152	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Mayonnaise	Mayoinase Maetro 1Kg/Dus	02 Oktober 2025	900/1.13.3/225/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp	299.500,00	Rp 299.500,00	02-Oct-25	1	Rp	299.500,00	Rp 299.500,00	Tefa Kuliner	0	Rp	299.500,00	Rp -
153	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Mayonnaise	Mayoinase Maetro 1Kg/Dus	02 Oktober 2025	900/1.13.3/225/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp	30.900,00	Rp 154.500,00	02-Oct-25	5	Rp	30.900,00	Rp 154.500,00	Tefa Kuliner	0	Rp	30.900,00	Rp -
154	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Mayonnaise	Air	08 Oktober 2025	900/1.13.3/232/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp	5.000,00	Rp 5.000,00	08-Oct-25	1	Rp	5.000,00	Rp 5.000,00	Tefa Kuliner	0	Rp	5.000,00	Rp -
155	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	TEMPE	TEMPE	10 Oktober 2025	900/1.13.3/243/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	20	Rp	1.000,00	Rp 20.000,00	10-Oct-25	20	Rp	1.000,00	Rp 20.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	1.000,00	Rp -
156	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	KERTAS BURGER	KERTAS BURGER 25 X 27	10 Oktober 2025	900/1.13.3/244/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp	10.000,00	Rp 10.000,00	10-Oct-25	1	Rp	10.000,00	Rp 10.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	10.000,00	Rp -
157	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Ajinomoto	AJINOMOTO 116 GR	11 Oktober 2025	900/1.13.3/251/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp	5.000,00	Rp 5.000,00	11-Oct-25	1	Rp	5.000,00	Rp 5.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	5.000,00	Rp -
158	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	CABE HIJAU	CABE HIJAU	02 November 2025	900/1.13.3/256/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,5	Rp	48.000,00	Rp 24.000,00	02-Nov-25	0,5	Rp	48.000,00	Rp 24.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	48.000,00	Rp -
159	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	HOME INDUSTRI	HOME INDUSTRI	03 November 2025	900/1.13.3/256/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp	18.000,00	Rp 18.000,00	03-Nov-25	1	Rp	18.000,00	Rp 18.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	18.000,00	Rp -
160	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	HOME INDUSTRI	HOME INDUSTRI	03 November 2025	900/1.13.3/260/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp	18.000,00	Rp 36.000,00	03-Nov-25	2	Rp	18.000,00	Rp 36.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	18.000,00	Rp -
161	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	LANGKOK- LANGKOK	LANGKOK- LANGKOK	03 November 2025	900/1.13.3/260/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp	2.000,00	Rp 4.000,00	03-Nov-25	2	Rp	2.000,00	Rp 4.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	2.000,00	Rp -
162	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Susu Bubuk	Susu Bubuk /Pck 250 Gr	03 November 2025	900/1.13.3/260/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	24	Rp	11.500,00	Rp 276.000,00	03-Nov-25	24	Rp	11.500,00	Rp 276.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	11.500,00	Rp -
163	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Susu Bubuk /Pck 250gr	Susu Bubuk /Pck 250gr	03 November 2025	900/1.13.3/260/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	12	Rp	11.500,00	Rp 138.000,00	03-Nov-25	12	Rp	11.500,00	Rp 138.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	11.500,00	Rp -
164	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Tempe Potong	Tempe Potong	03 November 2025	900/1.13.3/260/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1,00	Rp	4.000,00	Rp 4.000,00	03-Nov-25	1	Rp	4.000,00	Rp 4.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	4.000,00	Rp -
165	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Cabe Nano	Cabe Nano /Kg	03 November 2025	900/1.13.3/258/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,3	Rp	56.000,00	Rp 16.800,00	03-Nov-25	0,3	Rp	56.000,00	Rp 16.800,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	56.000,00	Rp -
166	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Jeruk Raja King 0,5 Kg	Jeruk Raja King 0,5 Kg	03 November 2025	900/1.13.3/258/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp	25.000,00	Rp 50.000,00	03-Nov-25	2	Rp	25.000,00	Rp 50.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	25.000,00	Rp -
167	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Powder Chocolate	Powder Chocolate	05 November 2025	900/1.13.3/272/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp	150.000,00	Rp 450.000,00	05-Nov-25	3	Rp	150.000,00	Rp 450.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	150.000,00	Rp -
168	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Powder Matcha	Powder Matcha	05 November 2025	900/1.13.3/272/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp	230.000,00	Rp 690.000,00	05-Nov-25	3	Rp	230.000,00	Rp 690.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	230.000,00	Rp -
169	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Syrup Caramel Davinci	Syrup Caramel Davinci	05 November 2025	900/1.13.3/272/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp	145.000,00	Rp 145.000,00	05-Nov-25	1	Rp	145.000,00	Rp 145.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	145.000,00	Rp -
170	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	TAHU	TAHU	04 Desember 2025	900/1.13.3/300/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	30	Rp	1.000,00	Rp 30.000,00	04-Dec-25	30	Rp	1.000,00	Rp 30.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	1.000,00	Rp -
171	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Tempe	TEMPE	04 Desember 2025	900/1.13.3/300/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	20	Rp	1.000,00	Rp 20.000,00	04-Dec-25	20	Rp	1.000,00	Rp 20.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	1.000,00	Rp -
172	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Tempe	Tempe	04 Desember 2025	900/1.13.3/300/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp	4.000,00	Rp 40.000,00	04-Dec-25	10	Rp	4.000,00	Rp 40.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	4.000,00	Rp -
173	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Matca powder	Drink Matca Latte 500gr	04 Desember 2025	900/1.13.3/041/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp	25.000,00	Rp 50.000,00	04-Dec-25	2	Rp	25.000,00	Rp 50.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	25.000,00	Rp -
174	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Velvet Powder	Drink Red Velvet 500gr	04 Desember 2025	900/1.13.3/041/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp	25.000,00	Rp 75.000,00	04-Dec-25	3	Rp	25.000,00	Rp 75.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	25.000,00	Rp -
175	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Chocolate powder	Drink Red Velvet 500gr	04 Desember 2025	900/1.13.3/041/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp	26.000,00	Rp 78.000,00	04-Dec-25	3	Rp	26.000,00	Rp 78.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	26.000,00	Rp -
176	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	ABC Syrup Orange 460ml	ABC	04 Desember 2025	900/1.13.3/041/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp	11.500,00	Rp 23.000,00	04-Dec-25	2	Rp	11.500,00	Rp 23.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	11.500,00	Rp -
177	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Cabe Merah	CABE MERAH	04 Desember 2025	900/1.13.3/304/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp	91.000,00	Rp 91.000,00	04-Dec-25	1	Rp	91.000,00	Rp 91.000,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	91.000,00	Rp -
178	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Cabe Nano	CABE NANO NANO	04 Desember 2025	900/1.13.3/304/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,25	Rp	110.000,00	Rp 27.500,00	04-Dec-25	0,25	Rp	110.000,00	Rp 27.500,00	Kuliner/Coffee Shop	0	Rp	110.000,00	Rp -
179	0005	Belanja Bahan - Bahan Baku	Bumbu Masak	Bumbu Giling /Kg

NO		JENIS REKENING	NAMA BARANG	MEREK	PENERIMAAN					PENGELUARAN						SISA			
					Tanggal Terima	No/Tgl.Surat Dasar Penerimaan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Tanggal Keluar	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Peruntukan		Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	
1		2	3	4	5	6	7	8	9 (7x8)	10	11	12	13 (11x12)	14		15	16	17	
									Rp 187.950,00				Rp 127.950,00					Rp 60.000,00	
209	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Jarum Pentul	-	22 Februari 2025	900/1.13.3/021/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	12	Rp 5.000,00	Rp 60.000,00	22-Feb-25	12	Rp 5.000,00	Rp 60.000,00	Toko Selasih		0	Rp 5.000,00	Rp	-
210	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Kapur Pensil	-	22 Februari 2025	900/1.13.3/021/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 48.000,00	Rp 48.000,00	22-Feb-25	1	Rp 48.000,00	Rp 48.000,00	Toko Selasih		0	Rp 48.000,00	Rp	-
211	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Karet 1"	-	22 Februari 2025	900/1.13.3/021/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 4.000,00	Rp 20.000,00	22-Feb-25	5	Rp 4.000,00	Rp 20.000,00	Toko Selasih		0	Rp 4.000,00	Rp	-
212	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Karet Kecil	-	22 Februari 2025	900/1.13.3/021/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 2.000,00	Rp 10.000,00	22-Feb-25	5	Rp 2.000,00	Rp 10.000,00	Toko Selasih		0	Rp 2.000,00	Rp	-
213	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Meteran Kain	-	22 Februari 2025	900/1.13.3/021/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 48.000,00	Rp 96.000,00	22-Feb-25	2	Rp 48.000,00	Rp 96.000,00	Toko Selasih		0	Rp 48.000,00	Rp	-
214	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Penggaris Pinggul	-	25 Februari 2025	900/1.13.3/023/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 10.000,00	Rp 30.000,00	25-Feb-25	3	Rp 10.000,00	Rp 30.000,00	Toko Selasih		0	Rp 10.000,00	Rp	-
215	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Penggaris Pola	-	25 Februari 2025	900/1.13.3/023/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 5.000,00	Rp 50.000,00	25-Feb-25	10	Rp 5.000,00	Rp 50.000,00	Toko Selasih		0	Rp 5.000,00	Rp	-
216	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Penggaris Siku	-	25 Februari 2025	900/1.13.3/023/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 15.000,00	Rp 45.000,00	25-Feb-25	3	Rp 15.000,00	Rp 45.000,00	Toko Selasih		0	Rp 15.000,00	Rp	-
217	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Air Mineral Botol	Sanford Botol 600ml	25 Februari 2025	900/1.13.3/026/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 35.000,00	Rp 175.000,00	25-Feb-25	5	Rp 35.000,00	Rp 175.000,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 35.000,00	Rp	-
218	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Gula Pasir Kemasan	Gula Pasir	21 April 2025	900/1.13.3/044/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 15.500,00	Rp 46.500,00	21-Apr-25	3	Rp 15.500,00	Rp 46.500,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 15.500,00	Rp	-
219	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Gula Pasir Kemasan	Gula Sweet 500	21 April 2025	900/1.13.3/044/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 12.000,00	Rp 12.000,00	21-Apr-25	1	Rp 12.000,00	Rp 12.000,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 12.000,00	Rp	-
220	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Gula Pasir Kemasan	Gula Pasir	22 April 2025	900/1.13.3/052/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	20	Rp 13.800,00	Rp 276.000,00	22-Apr-25	20	Rp 13.800,00	Rp 276.000,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 13.800,00	Rp	-
221	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Gula Pasir Kemasan	Gula Pasir	09 Mei 2025	900/1.13.3/060/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	20	Rp 13.800,00	Rp 276.000,00	09-May-25	20	Rp 13.800,00	Rp 276.000,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 13.800,00	Rp	-
222	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Air Mineral Botol	PRIMA 600ML	13 Mei 2025	900/1.13.3/064/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 42.000,00	Rp 210.000,00	13-May-25	5	Rp 42.000,00	Rp 210.000,00	Toko Selasih		0	Rp 42.000,00	Rp	-
223	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Gula Pasir Kemasan	Gula Pasir 1000	19 Mei 2025	900/1.13.3/069/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 14.200,00	Rp 56.800,00	19-May-25	4	Rp 14.200,00	Rp 56.800,00	Toko Selasih		0	Rp 14.200,00	Rp	-
224	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Kapas Facial	Selection Kapas	19 Mei 2025	900/1.13.3/068/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 6.333,33	Rp 38.000,00	19-May-25	6	Rp 6.333,33	Rp 38.000,00	Toko Selasih		0	Rp 6.333,33	Rp	-
225	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Air Mineral Botol	Le Mineral 600ML	22 Mei 2025	079/BLUD-SMKN2TPI/2025	48	Rp 2.950,00	Rp 141.600,00	22-May-25	48	Rp 2.950,00	Rp 141.600,00	Tefa ULP		0	Rp 2.950,00	Rp	-
226	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Gula Pasir Kemasan	Gula Pasir /Kg	26 Mei 2025	900/1.13.3/090/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	30	Rp 13.800,00	Rp 414.000,00	26-May-25	30	Rp 13.800,00	Rp 414.000,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 13.800,00	Rp	-
227	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Air Mineral	Sanford Botol 600ml	26 Mei 2025	900/1.13.3/090/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 32.500,00	Rp 325.000,00	26-May-25	10	Rp 32.500,00	Rp 325.000,00	Toko Selasih		0	Rp 32.500,00	Rp	-
228	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Benang Jahit	-	27 Mei 2025	900/1.13.3/099/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 28.000,00	Rp 28.000,00	27-May-25	1	Rp 28.000,00	Rp 28.000,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 28.000,00	Rp	-
229	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Gula Pasir Kemasan	Gula Pasir 1000	18 Juni 2025	900/1.13.3/110/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	8	Rp 14.200,00	Rp 113.600,00	18-Jun-25	8	Rp 14.200,00	Rp 113.600,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 14.200,00	Rp	-
230	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Gula Pasir Kemasan	Gula Pasir - 1000	28 Juli 2025	900/1.13.3/133/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	8	Rp 14.000,00	Rp 112.000,00	28-Jul-25	8	Rp 14.000,00	Rp 112.000,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 14.000,00	Rp	-
231	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Gula Pasir Kemasan	Gula Pasir /kg	28 Juli 2025	900/1.13.3/131/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	20	Rp 13.700,00	Rp 274.000,00	28-Jul-25	20	Rp 13.700,00	Rp 274.000,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 13.700,00	Rp	-
232	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Gula Pasir Kemasan	Gula Pasir	06 Agustus 2025	900/1.13.3/153/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 14.000,00	Rp 28.000,00	06-Aug-25	2	Rp 14.000,00	Rp 28.000,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 14.000,00	Rp	-
233	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Gula Pasir Kemasan	Gula Pasir	16 Agustus 2025	900/1.13.3/158/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	50	Rp 13.700,00	Rp 685.000,00	16-Aug-25	50	Rp 13.700,00	Rp 685.000,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 13.700,00	Rp	-
234	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Gula Pasir Kemasan	Gula Pasir	25 Agustus 2025	900/1.13.3/165/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 14.200,00	Rp 71.000,00	25-Aug-25	5	Rp 14.200,00	Rp 71.000,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 14.200,00	Rp	-
235	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Air Mineral Botol	Sanford Botol 600ml	27 Agustus 2025	900/1.13.3/170/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 35.000,00	Rp 350.000,00	27-Aug-25	10	Rp 35.000,00	Rp 350.000,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 35.000,00	Rp	-
236	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Benang Jahit	-	03 September 2025	900/1.13.3/086/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	12	Rp 2.500,00	Rp 30.000,00	03-Sep-25	12	Rp 2.500,00	Rp 30.000,00	Toko Selasih		0	Rp 2.500,00	Rp	-
237	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Kain Katun	Kain Oxford B228BT	03 September 2025	900/1.13.3/188/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 812.800,00	Rp 812.800,00	03-Sep-25	1	Rp 812.800,00	Rp 812.800,00	Tefa Busana		0	Rp 812.800,00	Rp	-
238	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Kain Katun	Kain Oxford M250T	03 September 2025	900/1.13.3/188/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 812.800,00	Rp 1.625.600,00	03-Sep-25	2	Rp 812.800,00	Rp 1.625.600,00	Tefa Busana		0	Rp 812.800,00	Rp	-
239	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Kain Katun	Kain Oxford M385S	03 September 2025	900/1.13.3/188/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 803.800,00	Rp 1.607.600,00	03-Sep-25	2	Rp 803.800,00	Rp 1.607.600,00	Tefa Busana		0	Rp 803.800,00	Rp	-
240	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Kain Katun	Kain Oxford P-W/1	03 September 2025	900/1.13.3/188/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 718.800,00	Rp 718.800,00	03-Sep-25	1	Rp 718.800,00	Rp 718.800,00	Tefa Busana		0	Rp 718.800,00	Rp	-
241	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Kaos Kaki	-	03 September 2025	900/1.13.3/186/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	24	Rp 8.333,33	Rp 200.000,00	03-Sep-25	24	Rp 8.333,33	Rp 200.000,00	Toko Selasih		0	Rp 8.333,33	Rp	-
242	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Penggaris Pola	-	03 September 2025	900/1.13.3/186/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 10.000,00	Rp 100.000,00	03-Sep-25	10	Rp 10.000,00	Rp 100.000,00	Toko Selasih		0	Rp 10.000,00	Rp	-
243	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Kapur Jahit	-	03 September 2025	900/1.13.3/186/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	24	Rp -	Rp 80.000,00	03-Sep-25	24	Rp -	Rp 80.000,00	Toko Selasih		0	Rp -	Rp	-
244	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Pendedel	-	03 September 2025	900/1.13.3/186/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	12	Rp	Rp 39.000,00	03-Sep-25	12	Rp	Rp 39.000,00	Toko Selasih		0	Rp	Rp	-
245	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Gula Pasir Kemasan	Gula Pasir - 1000	07 September 2025	900/1.13.3/191/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	20	Rp 13.500,00	Rp 270.000,00	07-Sep-25	20	Rp 13.500,00	Rp 270.000,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 13.500,00	Rp	-
246	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Gula Pasir Kemasan	Gula Pasir - 1000	15 September 2025	900/1.13.3/201/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 13.500,00	Rp 54.000,00	15-Sep-25	4	Rp 13.500,00	Rp 54.000,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 13.500,00	Rp	-
247	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Kain Pelapis	Furing APL	17 September 2025	900/1.13.3/204/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 12.000,00	Rp 48.000,00	17-Sep-25	4	Rp 12.000,00	Rp 48.000,00	Tefa Busana		0	Rp 12.000,00	Rp	-
248	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Benang Jahit	-	17 September 2025	900/1.13.3/205/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 27.000,00	Rp 27.000,00	17-Sep-25	1	Rp 27.000,00	Rp 27.000,00	Tefa Busana		0	Rp 27.000,00	Rp	-
249	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Gula Pasir Kemasan	GULA PASIR-1000	23 September 2025	900/1.13.3/211/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 13.500,00	Rp 13.500,00	23-Sep-25	1	Rp 13.500,00	Rp 13.500,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 13.500,00	Rp	-
250	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Gula Pasir Kemasan	GULA PASIR-1000	23 September 2025	900/1.13.3/211/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	7	Rp 13.500,00	Rp 94.500,00	23-Sep-25	7	Rp 13.500,00	Rp 94.500,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 13.500,00	Rp	-
251	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Gula Pasir /Kg	Gula Pasir /Kg	08 Oktober 2025	900/1.13.3/090/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	8	Rp 13.800,00	Rp 110.400,00	08-Oct-25	8	Rp 13.800,00	Rp 110.400,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 13.800,00	Rp	-
252	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Gula Pasir Kemasan	Gula Pasir/Kg	24 September 2025	900/1.13.3/213/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	60	Rp 13.000,00	Rp 780.000,00	24-Sep-25	60	Rp 13.000,00	Rp 780.000,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 13.000,00	Rp	-
253	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Gula Pasir Kemasan	GULA PASIR	11 Oktober 2025	900/1.13.3/251/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 13.200,00	Rp 13.200,00	11-Oct-25	1	Rp 13.200,00	Rp 13.200,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 13.200,00	Rp	-
254	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Air Mineral Botol	Sanford Botol 600ml	11 Oktober 2025	900/1.13.3/251/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 34.000,00	Rp 34.000,00	11-Oct-25	1	Rp 34.000,00	Rp 34.000,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 34.000,00	Rp	-
255	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Air Mineral	SANFORD 600 ML	03 November 2025	900/1.13.3/259/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 34.000,00	Rp 34.000,00	03-Nov-25	1	Rp 34.000,00	Rp 34.000,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 34.000,00	Rp	-
256	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Air Mineral	SANFORD 600 ML	03 November 2025	900/1.13.3/245/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 32.500,00	Rp 65.000,00	03-Nov-25	2	Rp 32.500,00	Rp 65.000,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 32.500,00	Rp	-
257	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Air Mineral Botol	Sanford Botol 600ml	24 November 2025	900/1.13.3/262/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 32.500,00	Rp 130.000,00	24-Nov-25	4	Rp 32.500,00	Rp 130.000,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 32.500,00	Rp	-
258	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Air Mineral	SANFORD 600 ML	04 Desember 2025	900/1.13.3/306/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 34.000,00	Rp 68.000,00	04-Dec-25	2	Rp 34.000,00	Rp 68.000,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 34.000,00	Rp	-
259	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Air Mineral	SANFORD 600 ML	07 Desember 2025	900/1.13.3/307/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 34.000,00	Rp 102.000,00	07-Dec-25	3	Rp 34.000,00	Rp 102.000,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 34.000,00	Rp	-
260	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Gula Pasir Kemasan	Gula Pasir /Kg	09 Desember 2025	900/1.13.3/320/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 16.000,00	Rp 32.000,00	09-Dec-25	2	Rp 16.000,00	Rp 32.000,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 16.000,00	Rp	-
261	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Air Mineral	Sanford Botol 600ml	09 Desember 2025	900/1.13.3/320/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 35.000,00	Rp 210.000,00	09-Dec-25	6	Rp 35.000,00	Rp 210.000,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 35.000,00	Rp	-
262	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Air Mineral Gelas	Sanford Gelas 220ml	12 Desember 2025	343/BLUD-SMKN2TPI/2025	1	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00	12-Dec-25	1	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 20.000,00	Rp	-
263	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Air Mineral	Sanford Botol 600ml	12 Desember 2025	343/BLUD-SMKN2TPI/2025	2	Rp 34.000,00	Rp 68.000,00	12-Dec-25	2	Rp 34.000,00	Rp 68.000,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 34.000,00	Rp	-
264	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Air Mineral	Sanford Botol 600ml	16 Desember 2025	398/BLUD-SMKN2TPI/2025	3	Rp	Rp 100.000,00	16-Dec-25	3	Rp	Rp 100.000,00	Tefa ULP		0	Rp -	Rp	-
265	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Air Mineral	SANFORD 600 ML	23 Desember 2025	900/1.13.3/353/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	25	Rp 36.000,00	Rp 900.000,00	23-Dec-25	0	Rp 36.000,00	Rp -	Kuliner/Coffee shop		25	Rp 36.000,00	Rp	900.000,00
266	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Baterai	Alkaline AAA 2s	23 Desember 2025	900/1.13.3/355/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	8	Rp 18.000,00	Rp 144.000,00	23-Dec-25	0	Rp 18.000,00	Rp -	Kuliner/Coffee shop		8	Rp 18.000,00	Rp	144.000,00
267	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Benang Jahit	-	24 Desember 2025	900/1.13.3/351/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	24	Rp -	Rp 60.000,00	24-Dec-25	0	Rp -	Rp -	Toko Selasih		24	Rp -	Rp	60.000,00
268	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Dalaman Jilbab	-	24 Desember 2025	900/1.13.3/376/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 60.000,00	Rp 120.000,00	24-Dec-25	0	Rp 60.000,00	Rp -	Toko Selasih		2	Rp 60.000,00	Rp	120.000,00
269	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Gula Pasir Kemasan	Gula Pasir - 1000	24 Desember 2025	900/1.13.3/367/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 17.000,00	Rp 170.000,00	24-Dec-25	0	Rp 17.000,00	Rp -	Kuliner/Coffee shop		10	Rp 17.000,00	Rp	170.000,00
270	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Gula Pasir Kemasan	Gula Pasir - 1000	24 Desember 2025	900/1.13.3/367/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 17.000,00	Rp 85.000,00	24-Dec-25	0	Rp 17.000,00	Rp -	Kuliner/Coffee shop		5	Rp 17.000,00	Rp	85.000,00
271	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Gula Pasir Kemasan	Gula Pasir - 1000	24 Desember 2025	900/1.13.3/367/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 17.000,00	Rp 170.000,00	24-Dec-25	0	Rp 17.000,00	Rp -	Kuliner/Coffee shop		10	Rp 17.000,00	Rp	170.000,00
272	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Gula Pasir Kemasan	Gula Pasir - 1000	24 Desember 2025	900/1.13.3/367/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 17.000,00	Rp 170.000,00	24-Dec-25	0	Rp 17.000,00	Rp -	Kuliner/Coffee shop		10	Rp 17.000,00	Rp	170.000,00
273	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Gula Pasir Kemasan	GULA PASIR NO 2	29 Desember 2025	900/1.13.3/378/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 835.000,00	Rp 835.000,00	29-Dec-25	0	Rp 835.000,00	Rp -	Kuliner/Coffee shop		1	Rp 835.000,00	Rp	835.000,00
274	0012	Belanja Bahan - Bahan Lainnya	Kantong Plastik	STP Penguin 20x35 50'	18 Maret 2025	900/1.13.3/032/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	22	Rp 1.600,00	Rp 35.200,00	18 Maret 2025	22	Rp 1.600,00	Rp 35.200,00	Kuliner/Coffee shop		0	Rp 1.600,00	Rp	-
									Rp 14.168.100,00				Rp 11.514.100,00					Rp 2.654.000,00	
275		Belanja Bahan - Isi Tabung Pemadan Kebakaran	LPG 12 Kg	LPG	15 Mei 2025	900/1.3.3/067/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 200.000,00	Rp 600.000,00	15-May-25	3	Rp 200.000,00	Rp 600.000,00	TEFA KULINER-COFFEE SHOP		0	Rp 200.000,00	Rp	-
276		Belanja Bahan - Isi Tabung Pemadan Kebakaran	LPG 12 Kg	Bright Gas	06 Agustus 2025	900/1.3.3/154/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 245.000,00	Rp 490.000,00	06-Aug-25	2	Rp 245.000,00	Rp 490.000,00	TEFA KULINER-COFFEE SHOP		0	Rp 245.000,00	Rp	-
277		Belanja Bahan - Isi Tabung Pemadan Kebakaran	LPG 12 Kg	Bright Gas	16 Agustus 2025	900/1.3.3/158/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 245.000,00	Rp 245.000,00	16-Aug-25	1	Rp 245.000,00	Rp 245.000,00	TEFA KULINER-COFFEE SHOP		0	Rp 245.000,00	Rp	-
278		Belanja Bahan - Isi Tabung Pemadan Kebakaran	LPG 12 Kg	Bright Gas	09 September 2025	900/1.3.3/198/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 245.000,00	Rp 245.000,00	09-Sep-25	1	Rp 245.000,00	Rp 245.000,00	TEFA KULINER-COFFEE SHOP		0	Rp 245.000,00	Rp	-
279		Belanja Bahan - Isi Tabung Pemadan Kebakaran	LPG 12 Kg	Bright Gas	09 September 2025	900/1.3.3/230/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 245.000,00	Rp 245.000,00	09-Sep-25	1	Rp 245.000,00	Rp 245.000,00	TEFA KULINER-COFFEE SHOP		0	Rp 245.000,00	Rp	-
280		Belanja Bahan - Isi Tabung Pemadan Kebakaran	LPG 12 Kg	Bright Gas	30 Desember 2025	900/1.3.3/383/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 245.000,00	Rp 735.000,00	30-Dec-25	0	Rp 245.000,00	Rp -	TEFA KULINER-COFFEE SHOP		3	Rp 245.000,00	Rp	735.000,00
281		Belanja Bahan - Isi Tabung Pemadan Kebakaran	LPG 5 Kg	LPG	30 Desember 2025	900/1.3.3/384/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 130.000,00	Rp 260.000,00	30-Dec-25	0	Rp 130.000,00	Rp -	TEFA KULINER-COFFEE SHOP		2	Rp 130.000,00	Rp	260.000,00
									Rp 2.820.000,00				Rp 1.825.000,00					Rp 995.000,00	
282	0024	Belanja Bahan / Alat Untuk Kegiatan Kantor - ATK	Jilid Biasa	Jilid/Cetak Laporan	24 Maret 2025	035/BLUD-SMKN2TPI/2025	1	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	24-Mar-25	1	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Adm Keuangan		0	Rp 150.000,00	Rp	-
283	0024	Belanja Bahan / Alat Untuk Kegiatan Kantor - ATK	Thermal/Kertas Billing	SIDU	18 Februari 2025	900/1.3.3/011/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 25.000,00	Rp 100.000,00	18-Feb-25	4	Rp 25.000,00	Rp 100.000,00	Toko Selasih		0	Rp 25.000,00	Rp	-
284	0024	Belanja Bahan / Alat Untuk Kegiatan Kantor - ATK	Pena	Standart AE7	20 Februari 2025	900/1.3.3/017/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 199.000,00	Rp 199.000,00	20-Feb-25	1	Rp 199.000,00	Rp 199.000,00	Toko Selasih		0	Rp 199.000,00	Rp	-
285	0024	Belanja Bahan / Alat Untuk Kegiatan Kantor - ATK	Cutter Kecil	TACO	20 Februari 2025	900/1.3.3/017/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	20-Feb-25	1	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Toko Selasih		0	Rp 25.000,00	Rp	-
286	0024	Belanja Bahan / Alat Untuk Kegiatan Kantor - ATK	Tipe-x	Kenko	20 Februari 2025	900/1.3.3/017/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 60.000,00	Rp 60.000,00	20-Feb-25	1	Rp 60.000,00	Rp 60.000,00	Toko Selasih		0	Rp 60.000,00	Rp	-
287	0024	Belanja Bahan / Alat Untuk Kegiatan Kantor - ATK	Buku Tulis	SIDU	20 Februari 2025	900/1.3.3/017/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	10	Rp 32.500,00	Rp 325.000,00	20-Feb-25	10	Rp 32.500,00	Rp 325.000,00	Toko Selasih		0	Rp 32.500,00	Rp	-
288	0024	Belanja Bahan / Alat Untuk Kegiatan Kantor - ATK	Doublepolio Bsergari	SIDU	20 Februari 2025	900/1.3.3/018/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	1	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	20-Feb-25	1	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Toko Selasih		0	Rp 25.000,00	Rp	-
289	0024	Belanja Bahan / Alat Untuk Kegiatan Kantor - ATK	Buku Tulis Maxy	Campus	08 Mei 2025	900/1.3.3/058/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	7	Rp 5.000,00	Rp 35.000,00	08-May-25	7	Rp 5.000,00	Rp 35.000,00	Toko Selasih		0	Rp 5.000,00	Rp	-
290	0024	Belanja Bahan / Alat Untuk Kegiatan Kantor - ATK	Buku Tulis	SIDU	08 Mei 2025	900/1.3.3/058/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 32.500,00	Rp 97.500,00	08-May-25	3	Rp 32.500,00	Rp 97.500,00	Toko Selasih		0	Rp 32.500,00	Rp	-
291	0024	Belanja Bahan / Alat Untuk Kegiatan Kantor - ATK	Penyepit Kertas	Paper Clip Combo	08 Mei 2025	900/1.3.3/058/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 17.000,00	Rp 17.000,00	08-May-25	1	Rp 17.000,00	Rp 17.000,00	Toko Selasih		0	Rp 17.000,00	Rp	-
292	0024	Belanja Bahan / Alat Untuk Kegiatan Kantor - ATK	Pengga

NO		JENIS REKENING	NAMA BARANG	MEREK	PENERIMAAN					PENGELUARAN						SISA		
					Tanggal Terima	No/Tgl.Surat Dasar Penerimaan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Tanggal Keluar	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Peruntukan		Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
1		2	3	4	5	6	7	8	9 (7x8)	10	11	12	13 (11x12)	14		15	16	17
307	0024	Belanja Bahan / Alat Untuk Kegiatan Kantor - ATK	Buku Tulis	-	23 Desember 2025	900/1.3.3/354/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 33.000,00	Rp 165.000,00	23-Dec-25	0	Rp 33.000,00	Rp -	Toko Selasih		5	Rp 33.000,00	Rp 165.000,00
308	0024	Belanja Bahan / Alat Untuk Kegiatan Kantor - ATK	Pena Biasa	Standart AE7	23 Desember 2025	900/1.3.3/354/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 199.000,00	Rp 398.000,00	23-Dec-25	0	Rp 199.000,00	Rp -	Toko Selasih		2	Rp 199.000,00	Rp 398.000,00
309	0024	Belanja Bahan / Alat Untuk Kegiatan Kantor - ATK	Pena Cair	Joyko	23 Desember 2025	900/1.3.3/354/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 264.000,00	Rp 528.000,00	23-Dec-25	0	Rp 264.000,00	Rp -	Toko Selasih		2	Rp 264.000,00	Rp 528.000,00
310	0024	Belanja Bahan / Alat Untuk Kegiatan Kantor - ATK	Penghhapus Kecil	Joyko	23 Desember 2025	900/1.3.3/354/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 31.000,00	Rp 62.000,00	23-Dec-25	0	Rp 31.000,00	Rp -	Toko Selasih		2	Rp 31.000,00	Rp 62.000,00
311	0024	Belanja Bahan / Alat Untuk Kegiatan Kantor - ATK	Pensil 2B	Joyko	23 Desember 2025	900/1.3.3/354/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 144.000,00	Rp 144.000,00	23-Dec-25	0	Rp 144.000,00	Rp -	Toko Selasih		1	Rp 144.000,00	Rp 144.000,00
312	0024	Belanja Bahan / Alat Untuk Kegiatan Kantor - ATK	Kertas A3	Sidu	03 Desember 2025	900/1.13.2/1BANPEMSMKN2TPI/2025	2	Rp 300.000,00	Rp 600.000,00	03-Dec-25	2	Rp 300.000,00	Rp 600.000,00	Toko Selasih		0	Rp 300.000,00	Rp -
313	0024	Belanja Bahan / Alat Untuk Kegiatan Kantor - ATK	Map arsip	Bantex	03 Desember 2025	900/1.13.2/1BANPEMSMKN2TPI/2025	10	Rp 35.000,00	Rp 350.000,00	03-Dec-25	10	Rp 35.000,00	Rp 350.000,00	Proyek Pembelajaran		0	Rp 35.000,00	Rp -
314	0024	Belanja Bahan / Alat Untuk Kegiatan Kantor - ATK	Sheet Protector	Profile	03 Desember 2025	900/1.13.2/1BANPEMSMKN2TPI/2025	10	Rp 9.000,00	Rp 90.000,00	03-Dec-25	10	Rp 9.000,00	Rp 90.000,00	Proyek Pembelajaran		0	Rp 9.000,00	Rp -
315	0024	Belanja Bahan / Alat Untuk Kegiatan Kantor - ATK	Pensil 2B	Kenko	03 Desember 2025	900/1.13.2/1BANPEMSMKN2TPI/2025	2	Rp 41.753,50	Rp 83.507,00	03-Dec-25	2	Rp 41.753,50	Rp 83.507,00	Proyek Pembelajaran		0	Rp 41.753,50	Rp -
									Rp 5.798.507,00				Rp 4.171.507,00					Rp 1.627.000,00
316	0026	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Spanduk	Spanduk Kegiatan ULP	21 Mei 2025	077/BLUD-SMKN2TPI/2025	3	Rp 50.000,00	Rp 150.000,00	21-May-25	3	Rp 50.000,00	Rp 150.000,00	Tefa ULP		0	Rp 50.000,00	Rp -
317	0026	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Spanduk	Cetak Spanduk	15 Desember 2025	900/1.3.3/324/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 50.000,00	Rp 150.000,00	15-Dec-25	3	Rp 50.000,00	Rp 150.000,00	Tefa ULP		0	Rp 50.000,00	Rp -
318	0026	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Spanduk	Spanduk	07 Oktober 2025	900/1.13.1/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	1	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	07-Oct-25	1	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	Kegiatan/Workshop		0	Rp 300.000,00	Rp -
319	0026	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Spanduk	Spanduk	08 Desember 2025	900/1.13.1/2/BANPEMSMKN2TPI/2025	1	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	08-Dec-25	1	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	Kegiatan/Workshop		0	Rp 300.000,00	Rp -
320	0026	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Spanduk	Spanduk	09 Desember 2025	900/1.13.1/3/BANPEMSMKN2TPI/2025	1	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	09-Dec-25	1	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	Kegiatan/Workshop		0	Rp 300.000,00	Rp -
									Rp 1.200.000				Rp 1.200.000					-
321	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Kantong Plastik (Gelas Bening)		18 Februari 2025	900/1.3.3/013/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	1	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	18-Feb-25	1	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 5.000,00	Rp -
322	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Gunting Kecil	Gunting SS	20 Februari 2025	900/1.3.3/017/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	1	Rp 45.000,00	Rp 45.000,00	20-Feb-25	1	Rp 45.000,00	Rp 45.000,00	Toko Selasih		0	Rp 45.000,00	Rp -
323	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Cup Gelas Datar	Tutup Gelas	21 April 2025	900/1.3.3/042/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	6	Rp 7.000,00	Rp 42.000,00	21-Apr-25	6	Rp 7.000,00	Rp 42.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 7.000,00	Rp -
324	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Cup Gelas	Gelas Oval 16oz	21 April 2025	900/1.3.3/042/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	6	Rp 22.500,00	Rp 135.000,00	21-Apr-25	6	Rp 22.500,00	Rp 135.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 22.500,00	Rp -
325	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Cup Gelas	Gelas Oval 22oz	21 April 2025	900/1.3.3/042/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	6	Rp 25.000,00	Rp 150.000,00	21-Apr-25	6	Rp 25.000,00	Rp 150.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 25.000,00	Rp -
326	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Tutup Gelas Kertas	Tutup Gelas	21 April 2025	900/1.3.3/042/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	2	Rp 12.000,00	Rp 24.000,00	21-Apr-25	2	Rp 12.000,00	Rp 24.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 12.000,00	Rp -
327	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Cup Roti	Cake Case Roti Motif	22 April 2025	900/1.3.3/049/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 62.000,00	Rp 310.000,00	22-Apr-25	5	Rp 62.000,00	Rp 310.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 62.000,00	Rp -
328	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Cup Roti	Cake Case Roti Sampan	22 April 2025	900/1.3.3/049/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 76.000,00	Rp 152.000,00	22-Apr-25	2	Rp 76.000,00	Rp 152.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 76.000,00	Rp -
329	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Kantong plastik	OPP Lem	22 April 2025	900/1.3.3/051/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	10	Rp 12.000,00	Rp 120.000,00	22-Apr-25	10	Rp 12.000,00	Rp 120.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 12.000,00	Rp -
330	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Kantong Segitiga/Pipping Bag	Kantong Segitiga(50x100 pcs)	22 April 2025	900/1.3.3/051/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	3	Rp 10.000,00	Rp 30.000,00	22-Apr-25	3	Rp 10.000,00	Rp 30.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 10.000,00	Rp -
331	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Mangkok	Kontener Klir Bowl 300ml (20x25)	22 April 2025	900/1.3.3/051/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	10	Rp 17.000,00	Rp 170.000,00	22-Apr-25	10	Rp 17.000,00	Rp 170.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 17.000,00	Rp -
332	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Plastik	PP Klip	22 April 2025	900/1.3.3/051/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	1	Rp 31.000,00	Rp 31.000,00	22-Apr-25	1	Rp 31.000,00	Rp 31.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 31.000,00	Rp -
333	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Buku Cek	Bank Riau Kepri Syariah	07 Mei 2025	-	1	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00	07-May-25	1	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00	Adm Keuangan		0	Rp 100.000,00	Rp -
334	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Cup Kue	Cake Case Roti Bulat Motif	09 Mei 2025	900/1.3.3/061/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	5	Rp 62.000,00	Rp 310.000,00	09-May-25	5	Rp 62.000,00	Rp 310.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 62.000,00	Rp -
335	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Plastik	K OPP Plastik 13x13	09 Mei 2025	900/1.3.3/061/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	20	Rp 12.500,00	Rp 250.000,00	09-May-25	20	Rp 12.500,00	Rp 250.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 12.500,00	Rp -
336	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Kantong Segitiga	AMA SS	09 Mei 2025	900/1.3.3/061/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	3	Rp 11.000,00	Rp 33.000,00	09-May-25	3	Rp 11.000,00	Rp 33.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 11.000,00	Rp -
337	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Cup Mika	Mika MMPG 4X	09 Mei 2025	900/1.3.3/061/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	6	Rp 18.000,00	Rp 108.000,00	09-May-25	6	Rp 18.000,00	Rp 108.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 18.000,00	Rp -
338	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Cup Mika	Mika MMPG 6X	09 Mei 2025	900/1.3.3/061/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	20	Rp 7.000,00	Rp 140.000,00	09-May-25	20	Rp 7.000,00	Rp 140.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 7.000,00	Rp -
339	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Cup Kue	Cake Case Roti Bulat	26 Mei 2025	900/1.3.3/083/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	10	Rp 75.000,00	Rp 750.000,00	26-May-25	10	Rp 75.000,00	Rp 750.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 75.000,00	Rp -
340	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Plastik	K OPP Plastik	26 Mei 2025	900/1.3.3/083/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	44	Rp 11.500,00	Rp 506.000,00	26-May-25	44	Rp 11.500,00	Rp 506.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 11.500,00	Rp -
341	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Mangkok/Cup Mika	Klir Bowl 300ml	26 Mei 2025	900/1.3.3/083/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	10	Rp 18.000,00	Rp 180.000,00	26-May-25	10	Rp 18.000,00	Rp 180.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 18.000,00	Rp -
342	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Kantong Plastik	KT Teratai 24	26 Mei 2025	900/1.3.3/083/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	5	Rp 6.500,00	Rp 32.500,00	26-May-25	5	Rp 6.500,00	Rp 32.500,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 6.500,00	Rp -
343	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Plastik	KT. Angel Bening 28	27 Mei 2025	900/1.3.3/097/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	2	Rp 8.500,00	Rp 17.000,00	27-May-25	2	Rp 8.500,00	Rp 17.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 8.500,00	Rp -
344	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Kantong plastik	HD 6x10	17 Juni 2025	900/1.3.3/105/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	1	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	17-Jun-25	1	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 30.000,00	Rp -
345	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Kantong Gelas	Kantong	18 Juni 2025	900/1.3.3/112/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	1	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	18-Jun-25	1	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 5.000,00	Rp -
346	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Kantong Gelas	Kantong	18 Juni 2025	900/1.3.3/112/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	1	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	18-Jun-25	1	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 5.000,00	Rp -
347	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Kantong plastik	Kantong Plastik BERB	18 Juni 2025	900/1.3.3/116/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	4	Rp 200,00	Rp 800,00	18-Jun-25	4	Rp 200,00	Rp 800,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 200,00	Rp -
348	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Kantong plastik	Klip Plastik 5x8	19 Juni 2025	900/1.3.3/118/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	10	Rp 3.500,00	Rp 35.000,00	19-Jun-25	10	Rp 3.500,00	Rp 35.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 3.500,00	Rp -
349	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Kantong Plastik	OPP Lem	28 Juli 2025	900/1.3.3/132/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 12.000,00	Rp 120.000,00	28-Jul-25	10	Rp 12.000,00	Rp 120.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 12.000,00	Rp -
350	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	nnya	Kantong Segitiga (50x100 pcs)	28 Juli 2025	900/1.3.3/132/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 10.000,00	Rp 20.000,00	28-Jul-25	2	Rp 10.000,00	Rp 20.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 10.000,00	Rp -
351	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Cup Mika	Mika MMPG 4X (20x100)	30 Juli 2025	900/1.3.3/136/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 18.000,00	Rp 180.000,00	30-Jul-25	10	Rp 18.000,00	Rp 180.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 18.000,00	Rp -
352	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Cup Mika	Mika MMPG 6X (60x100)	30 Juli 2025	900/1.3.3/136/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	20	Rp 7.000,00	Rp 140.000,00	30-Jul-25	20	Rp 7.000,00	Rp 140.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 7.000,00	Rp -
353	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Cup Roti	Cake Case	30 Juli 2025	900/1.3.3/136/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 62.000,00	Rp 310.000,00	30-Jul-25	5	Rp 62.000,00	Rp 310.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 62.000,00	Rp -
354	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Kantong Plastik	Kantong Gelas Bening 1 Cup	30 Juli 2025	900/1.3.3/138/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	30-Jul-25	1	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 5.000,00	Rp -
355	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Kanting Plastik	Kantong Gelas Bening 2 Cup	30 Juli 2025	900/1.3.3/138/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	30-Jul-25	1	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 5.000,00	Rp -
356	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Cup Gelas	Tutup Gelas Oval SB/Tiptop (40x50)	30 Juli 2025	900/1.3.3/138/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 7.000,00	Rp 42.000,00	30-Jul-25	6	Rp 7.000,00	Rp 42.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 7.000,00	Rp -
357	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Cup Roti	Cake Case	18 Agustus 2025	900/1.3.3/160/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 62.000,00	Rp 310.000,00	18-Aug-25	5	Rp 62.000,00	Rp 310.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 62.000,00	Rp -
358	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Cup Roti	Cake Case	25 Agustus 2025	900/1.3.3/169/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 30.000,00	Rp 90.000,00	25-Aug-25	3	Rp 30.000,00	Rp 90.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 30.000,00	Rp -
359	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Cup Plastik	Tutup Gelas Oval SB/Tiptop (40x50)	25 Agustus 2025	900/1.3.3/166/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	10	Rp 7.000,00	Rp 70.000,00	25-Aug-25	10	Rp 7.000,00	Rp 70.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 7.000,00	Rp -
360	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Kantong Plastik	Kantong Gelas Bening 1 Cup	25 Agustus 2025	900/1.3.3/166/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	1	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	25-Aug-25	1	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 5.000,00	Rp -
361	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Kantong Plastik	Kantong Gelas Bening 2 Cup	25 Agustus 2025	900/1.3.3/166/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	1	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	25-Aug-25	1	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 5.000,00	Rp -
362	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Cup Kue	Cake Case Roti Bulat Motif	25 Agustus 2025	900/1.3.3/166/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	5	Rp 62.000,00	Rp 310.000,00	25-Aug-25	5	Rp 62.000,00	Rp 310.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 62.000,00	Rp -
363	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Gunting Bening		03 September 2025	900/1.3.3/176/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	20	Rp 7.250,00	Rp 145.000,00	03-Sep-25	20	Rp 7.250,00	Rp 145.000,00	Toko Selasih		0	Rp 7.250,00	Rp -
364	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Kantong	HD Kuning	08 September 2025	900/1.3.3/196/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	1	Rp 30.500,00	Rp 30.500,00	08-Sep-25	1	Rp 30.500,00	Rp 30.500,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 30.500,00	Rp -
365	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Kantong bening	Kiko 19	08 September 2025	900/1.3.3/196/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	6	Rp 8.000,00	Rp 48.000,00	08-Sep-25	6	Rp 8.000,00	Rp 48.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 8.000,00	Rp -
366	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Kantong bening	Kiko 28	08 September 2025	900/1.3.3/196/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	4	Rp 8.300,00	Rp 33.200,00	08-Sep-25	4	Rp 8.300,00	Rp 33.200,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 8.300,00	Rp -
367	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Mangkok/Cup Mika	Kontener Klir Bowl 300ml (20x25)	15 September 2025	900/1.3.3/202/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 17.000,00	Rp 51.000,00	15-Sep-25	3	Rp 17.000,00	Rp 51.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 17.000,00	Rp -
368	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Kantong Gelas Bening	Kharis	23 September 2025	900/1.3.3/210/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	3	Rp 5.000,00	Rp 15.000,00	23-Sep-25	3	Rp 5.000,00	Rp 15.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 5.000,00	Rp -
369	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Kantong Plastik	Kharis	23 September 2025	900/1.3.3/210/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	3	Rp 5.000,00	Rp 15.000,00	23-Sep-25	3	Rp 5.000,00	Rp 15.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 5.000,00	Rp -
370	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Kantong Plastik	Kharis	23 September 2025	900/1.3.3/210/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	3	Rp 5.000,00	Rp 15.000,00	23-Sep-25	3	Rp 5.000,00	Rp 15.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 5.000,00	Rp -
371	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Kantong Bening	Kiko 16	24 September 2025	900/1.3.3/214/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	5	Rp 8.000,00	Rp 40.000,00	24-Sep-25	5	Rp 8.000,00	Rp 40.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 8.000,00	Rp -
372	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Mangkok/Cup Mika	Kontener Klir Bowl	24 September 2025	900/1.3.3/214/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	10	Rp 17.000,00	Rp 170.000,00	24-Sep-25	10	Rp 17.000,00	Rp 170.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 17.000,00	Rp -
373	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Paper Cup	Paper Cup Roti Kincir 15,5(10x300)	24 September 2025	900/1.3.3/214/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	3	Rp 135.000,00	Rp 405.000,00	24-Sep-25	3	Rp 135.000,00	Rp 405.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 135.000,00	Rp -
374	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Plastik	Kantong Segitiga	24 September 2025	900/1.3.3/214/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	3	Rp 10.000,00	Rp 30.000,00	24-Sep-25	3	Rp 10.000,00	Rp 30.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 10.000,00	Rp -
375	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Cup Roti	Cake Case Klasi 9,5 White (25)	26 September 2025	900/1.3.3/218/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	10	Rp 27.000,00	Rp 270.000,00	26-Sep-25	10	Rp 27.000,00	Rp 270.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 27.000,00	Rp -
376	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Plastik	Kopp Plastik 15x13	26 September 2025	900/1.3.3/218/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	50	Rp 13.000,00	Rp 650.000,00	26-Sep-25	50	Rp 13.000,00	Rp 650.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 13.000,00	Rp -
377	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Cake Case	Cake Case Roti Bulat Motif	29 September 2025	900/1.3.3/220/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	5	Rp 62.000,00	Rp 310.000,00	29-Sep-25	5	Rp 62.000,00	Rp 310.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 62.000,00	Rp -
378	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Kantong Plastik	KANTONG TALI 5 X 8	08 Oktober 2025	900/1.3.3/236/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	1	Rp 45.000,00	Rp 45.000,00	08-Oct-25	1	Rp 45.000,00	Rp 45.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 45.000,00	Rp -
379	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Kantong Plastik	KANTONG TALI 4 X 7	08 Oktober 2025	900/1.3.3/236/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	1	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	08-Oct-25	1	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 30.000,00	Rp -
380	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Kantong Plastik	KANTONG TALI 5 X 8	09 Oktober 2025	900/1.3.3/241/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	2	Rp 10.000,00	Rp 20.000,00	09-Oct-25	2	Rp 10.000,00	Rp 20.000,00	Tefa Kuliner-Coffee Shop		0	Rp 10.000,00	Rp -
381	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Gelas Oval 16Oz (20x50)	Gelas Oval 16Oz (20x50)	04 November 2025	900/1.3.3/253/BAST-BLUDSMKN2TPI

NO		JENIS REKENING	NAMA BARANG	MEREK	PENERIMAAN					PENGELUARAN						SISA		
					Tanggal Terima	No/Tgl.Surat Dasar Penerimaan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Tanggal Keluar	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Peruntukan		Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2		3	4	5		7	8	9 (7x8)	10	11	12	13 (11x12)	14		15	16	17
418	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Mayonaise 1kg	Maestro	15 Desember 2025	900/1.13.3/4/BANPEMSMKN2TPI/2025	5		30.900	154.500	15-Dec-25	5	Rp 30.900,00	Rp 154.500,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 30.900,00	Rp -
419	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Saus Sambal 24 Sachet	Sasa	15 Desember 2025	900/1.13.3/4/BANPEMSMKN2TPI/2025	12		6.800	81.600	15-Dec-25	12	Rp 6.800,00	Rp 81.600,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 6.800,00	Rp -
420	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Tepung Kanji	Tepung Kanji Pack-1000	15 Desember 2025	900/1.13.3/4/BANPEMSMKN2TPI/2025	10		9.500	95.000	15-Dec-25	10	Rp 9.500,00	Rp 95.000,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 9.500,00	Rp -
421	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Sabun Cuci Piring	Sunlight Ref-1500 J.Nipis	15 Desember 2025	900/1.13.3/4/BANPEMSMKN2TPI/2025	5		24.000	120.000	15-Dec-25	5	Rp 24.000,00	Rp 120.000,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 24.000,00	Rp -
422	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Pasta Coklat 5 Kg	Nesta	15 Desember 2025	900/1.13.3/3/BANPEMSMKN2TPI/2025	1		150.000	150.000	15-Dec-25	1	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 150.000,00	Rp -
423	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Fondant 5 Kg	Tigerson Super Fondant	15 Desember 2025	900/1.13.3/3/BANPEMSMKN2TPI/2025	3		362.500	1.087.500	15-Dec-25	3	Rp 362.500,00	Rp 1.087.500,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 362.500,00	Rp -
424	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Selai Cokelat 5 Kg 4 Pack	Dunia Bf C4	15 Desember 2025	900/1.13.3/3/BANPEMSMKN2TPI/2025	1		136.500	136.500	15-Dec-25	1	Rp 136.500,00	Rp 136.500,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 136.500,00	Rp -
425	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Selai Strawberry 5 kg	Lepatta Tro	15 Desember 2025	900/1.13.3/3/BANPEMSMKN2TPI/2025	1		91.000	91.000	15-Dec-25	1	Rp 91.000,00	Rp 91.000,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 91.000,00	Rp -
426	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Susu Bubuk 1000gr	Tep. Susu Pather	15 Desember 2025	900/1.13.3/3/BANPEMSMKN2TPI/2025	3		31.000	93.000	15-Dec-25	3	Rp 31.000,00	Rp 93.000,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 31.000,00	Rp -
427	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Choco Chips 1000gr	Tulipr	15 Desember 2025	900/1.13.3/3/BANPEMSMKN2TPI/2025	4		86.000	344.000	15-Dec-25	4	Rp 86.000,00	Rp 344.000,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 86.000,00	Rp -
428	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Minuman Berkarbonat Btl 250 M	Sprite Btl 250 Ml	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	3		33.200	99.600	15-Dec-25	3	Rp 33.200,00	Rp 99.600,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 33.200,00	Rp -
429	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Minuman Berkarbonat Btl 250 M	Fanta Straw	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	3		33.200	99.600	15-Dec-25	3	Rp 33.200,00	Rp 99.600,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 33.200,00	Rp -
430	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Choco Chip's Coklat Bulat / P2(	Choco Chip's Coklat Bulat / P200 Gr	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	2		19.500	39.000	15-Dec-25	2	Rp 19.500,00	Rp 39.000,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 19.500,00	Rp -
431	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Whipping Cream 1 Ltr	Shine Road	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	3		52.000	156.000	15-Dec-25	3	Rp 52.000,00	Rp 156.000,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 52.000,00	Rp -
432	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Tepung Cakra Kembar 1 Kg	Bogasari	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	4		14.600	58.400	15-Dec-25	4	Rp 14.600,00	Rp 58.400,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 14.600,00	Rp -
433	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Mentega 200 Gr	Anchor Unsalted Butter	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	2		61.000	122.000	15-Dec-25	2	Rp 61.000,00	Rp 122.000,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 61.000,00	Rp -
434	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Keju Cheddar 250 Gr X8/Box	Wincheez	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	1		95.000	95.000	15-Dec-25	1	Rp 95.000,00	Rp 95.000,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 95.000,00	Rp -
435	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Tepung Segitiga Biru Eko 1 Kg	Bogasari	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	4		12.200	48.800	15-Dec-25	4	Rp 12.200,00	Rp 48.800,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 12.200,00	Rp -
436	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Susu Kental Manis Pouch 535 G	Frisian Flag	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	4		16.000	64.000	15-Dec-25	4	Rp 16.000,00	Rp 64.000,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 16.000,00	Rp -
437	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Mentega 200 Gr	Anchor	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	4		57.000	228.000	15-Dec-25	4	Rp 57.000,00	Rp 228.000,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 57.000,00	Rp -
438	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Tepung Maizena 200 Gr	Baker King	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	2		9.200	18.400	15-Dec-25	2	Rp 9.200,00	Rp 18.400,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 9.200,00	Rp -
439	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Mayonaise 1kg	Maestro	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	1		21.000	21.000	15-Dec-25	1	Rp 21.000,00	Rp 21.000,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 21.000,00	Rp -
440	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Kp. Sp Ber 70 Gr	Koepoe-Koepoe	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	4		13.700	54.800	15-Dec-25	4	Rp 13.700,00	Rp 54.800,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 13.700,00	Rp -
441	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Tepung Wippy Cream 200 Gr X1	Haan	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	2		70.000	140.000	15-Dec-25	2	Rp 70.000,00	Rp 140.000,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 70.000,00	Rp -
442	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Coketat Bubuk 165 Gr	Van Houten	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	2		47.800	95.600	15-Dec-25	2	Rp 47.800,00	Rp 95.600,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 47.800,00	Rp -
443	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Kacang Cincang 250 Gr	Kacang Cincang 250 Gr	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	1		19.000	19.000	15-Dec-25	1	Rp 19.000,00	Rp 19.000,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 19.000,00	Rp -
444	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Mentega Putih 15 Kg/Pck 499	Menara	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	21		11.000	231.000	15-Dec-25	21	Rp 11.000,00	Rp 231.000,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 11.000,00	Rp -
445	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Gula Pasir / Kg	Gula Pasir / Kg	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	8		13.000	104.000	15-Dec-25	8	Rp 13.000,00	Rp 104.000,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 13.000,00	Rp -
446	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Soda Wate 250 ML	Polaris Supreme	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	21		4.700	98.700	15-Dec-25	21	Rp 4.700,00	Rp 98.700,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 4.700,00	Rp -
447	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Kop Bubuk 2 Gr X 60's / Bal	Nescafe Classic	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	2		75.000	150.000	15-Dec-25	2	Rp 75.000,00	Rp 150.000,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 75.000,00	Rp -
448	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Bubuk Creamer 50's / Bal	Nondairy	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	1		20.000	20.000	15-Dec-25	1	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 20.000,00	Rp -
449	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Teh Celup 25's	Prendjak	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	3		8.700	26.100	15-Dec-25	3	Rp 8.700,00	Rp 26.100,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 8.700,00	Rp -
450	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Cherry Merah / Pck 100 Gr	Cherry Merah / Pck 100 Gr	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	2		16.500	33.000	15-Dec-25	2	Rp 16.500,00	Rp 33.000,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 16.500,00	Rp -
451	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Gula Putih Sachet Isi 50's	Kristals	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	2		14.000	28.000	15-Dec-25	2	Rp 14.000,00	Rp 28.000,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 14.000,00	Rp -
452	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Sabun cuci piring 950 Ml J.Nps	Mama Lemon	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	2		14.000	28.000	15-Dec-25	2	Rp 14.000,00	Rp 28.000,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 14.000,00	Rp -
453	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Brown Sugar 8 Gr X 50's / Pak	Brown Sugar 8 Gr X 50's / Pak	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	1		22.000	22.000	15-Dec-25	1	Rp 22.000,00	Rp 22.000,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 22.000,00	Rp -
454	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Pembersih kain 700 ML	Gentle	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	2		18.500	37.000	15-Dec-25	2	Rp 18.500,00	Rp 37.000,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 18.500,00	Rp -
455	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Saus Sambal 1000 Gr	ABC	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	2		32.500	65.000	15-Dec-25	2	Rp 32.500,00	Rp 65.000,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 32.500,00	Rp -
456	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Saus Sambal Tomat 1000 Gr	ABC	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	1		20.900	20.900	15-Dec-25	1	Rp 20.900,00	Rp 20.900,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 20.900,00	Rp -
457	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Saus Sambal Extra Pds 950 Gr	ABC	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	1		30.500	30.500	15-Dec-25	1	Rp 30.500,00	Rp 30.500,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 30.500,00	Rp -
458	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Sosis Ayam 1 Kg	Asimo	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	1		46.000	46.000	15-Dec-25	1	Rp 46.000,00	Rp 46.000,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 46.000,00	Rp -
459	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Sosis Ayam 500 Gr	Asimo	15 Desember 2025	900/1.13.3/1/BANPEMSMKN2TPI/2025	1		23.500	23.500	15-Dec-25	1	Rp 23.500,00	Rp 23.500,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 23.500,00	Rp -
460	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Mika Mmpg 6x (60 X 100)	Mika Mmpg 6x (60 X 100)	15 Desember 2025	900/1.13.3/2/BANPEMSMKN2TPI/2025	20		7.890	157.800	15-Dec-25	20	Rp 7.890,00	Rp 157.800,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 7.890,00	Rp -
461	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Mika Mega 4a (20 X 100)	Mika Mega 4a (20 X 100)	15 Desember 2025	900/1.13.3/2/BANPEMSMKN2TPI/2025	10		25.920	259.200	15-Dec-25	10	Rp 25.920,00	Rp 259.200,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 25.920,00	Rp -
462	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Sendok Chinese Ama Bening (6)	Sendok Chinese Ama Bening (6)	15 Desember 2025	900/1.13.3/2/BANPEMSMKN2TPI/2025	5		7.320	36.600	15-Dec-25	5	Rp 7.320,00	Rp 36.600,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 7.320,00	Rp -
463	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Sendok 5" Trfinity Bening 99	Sendok 5" Trfinity Bening 100	15 Desember 2025	900/1.13.3/2/BANPEMSMKN2TPI/2025	8		6.200	49.600	15-Dec-25	8	Rp 6.200,00	Rp 49.600,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 6.200,00	Rp -
464	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Kopi Plastik 15 X 18	K Opp Plastik 15 X 18	15 Desember 2025	900/1.13.3/2/BANPEMSMKN2TPI/2025	50		14.650	732.500	15-Dec-25	50	Rp 14.650,00	Rp 732.500,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 14.650,00	Rp -
465	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Klir Bowl 300ml (20 X 25)	Klir Bowl 300ml (20 X 25)	15 Desember 2025	900/1.13.3/2/BANPEMSMKN2TPI/2025	20		20.285	405.700	15-Dec-25	20	Rp 20.285,00	Rp 405.700,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 20.285,00	Rp -
466	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Cake Case Roti Bulat Motif (2)	Cake Case Roti Bulat Motif (2)	15 Desember 2025	900/1.13.3/2/BANPEMSMKN2TPI/2025	10		69.870	698.700	15-Dec-25	10	Rp 69.870,00	Rp 698.700,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 69.870,00	Rp -
467	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Stiker Roll	Stiker Roll	15 Desember 2025	900/1.13.3/2/BANPEMSMKN2TPI/2025	1		11.300	11.300	15-Dec-25	1	Rp 11.300,00	Rp 11.300,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 11.300,00	Rp -
468	0036	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lain	Sticket Thankyou 2 Sisi	Sticket Thankyou 2 Sisi	15 Desember 2025	900/1.13.3/2/BANPEMSMKN2TPI/2025	3		16.900	50.700	15-Dec-25	3	Rp 16.900,00	Rp 50.700,00	Proyek Pembelajaran	0	Rp 16.900,00	Rp -
										19.144.293				Rp 17.848.793,00				Rp 1.295.500,00
469	0025	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Kertas Manila	-	20 Februari 2025	900/1.3.3/018/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	100	Rp 2.200,00	Rp 220.000,00	20-Feb-25	100	Rp 2.200,00	Rp 220.000,00	Toko Selasih		0	Rp 2.200,00	Rp -
470	0025	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Kertas HVS A4 70gr	SIDU	20 Februari 2025	900/1.3.3/018/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 46.000,00	Rp 46.000,00	20-Feb-25	1	Rp 46.000,00	Rp 46.000,00	Toko Selasih		0	Rp 46.000,00	Rp -
471	0025	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Kertas HVS F4 70gr	SIDU	20 Februari 2025	900/1.3.3/018/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 52.500,00	Rp 52.500,00	20-Feb-25	1	Rp 52.500,00	Rp 52.500,00	Toko Selasih		0	Rp 52.500,00	Rp -
472	0025	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Kertas Padi	-	20 Februari 2025	900/1.3.3/018/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	100	Rp 2.300,00	Rp 230.000,00	20-Feb-25	100	Rp 2.300,00	Rp 230.000,00	Toko Selasih		0	Rp 2.300,00	Rp -
473	0025	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Paperbag	-	21 April 2025	900/1.3.3/043/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 18.000,00	Rp 18.000,00	21-Apr-25	1	Rp 18.000,00	Rp 18.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 18.000,00	Rp -
474	0025	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Kertas Roti	-	22 April 2025	900/1.3.3/051/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	20	Rp 2.000,00	Rp 40.000,00	22-Apr-25	20	Rp 2.000,00	Rp 40.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 2.000,00	Rp -
475	0025	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Kertas Padi	-	08 Mei 2025	900/1.3.3/058/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	100	Rp 2.300,00	Rp 230.000,00	08-May-25	100	Rp 2.300,00	Rp 230.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 2.300,00	Rp -
476	0025	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Paperbag	AMA 5S	09 Mei 2025	900/1.3.3/061/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 15.000,00	Rp 75.000,00	09-May-25	5	Rp 15.000,00	Rp 75.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 15.000,00	Rp -
477	0025	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Paperbag	AMA 5S	19 Mei 2025	900/1.3.3/072/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 18.000,00	Rp 18.000,00	19-May-25	1	Rp 18.000,00	Rp 18.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 18.000,00	Rp -
478	0025	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Cup Kue Mika	-	27 Mei 2025	900/1.3.3/094/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	27-May-25	1	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 10.000,00	Rp -
479	0025	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Kertas Burger	-	27 Mei 2025	900/1.3.3/093/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 12.500,00	Rp 12.500,00	27-May-25	1	Rp 12.500,00	Rp 12.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 12.500,00	Rp -
480	0025	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Plastik	OPP Tape Solid 12mm	27 Mei 2025	900/1.3.3/096/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	27-May-25	1	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 30.000,00	Rp -
481	0025	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Paperbag	-	18 Juni 2025	900/1.13.3/112/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 18.000,00	Rp 18.000,00	18-Jun-25	1	Rp 18.000,00	Rp 18.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 18.000,00	Rp -
482	0025	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Thermal/Kertas Billing	SIDU	30 Juli 2025	900/1.13.3/137/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 26.000,00	Rp 26.000,00	30-Jul-25	1	Rp 26.000,00	Rp 26.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 26.000,00	Rp -
483	0025	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Paperbag	-	05 Agustus 2025	900/1.3.3/152/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 18.000,00	Rp 90.000,00	05-Aug-25	5	Rp 18.000,00	Rp 90.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 18.000,00	Rp -
484	0025	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Plastik	K OPP Plastik	18 Agustus 2025	900/1.3.3/160/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 13.000,00	Rp 78.000,00	18-Aug-25	6	Rp 13.000,00	Rp 78.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 13.000,00	Rp -
485	0025	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Cup Kue Mika	Mega A4	25 Agustus 2025	900/1.3.3/169/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 23.000,00	Rp 115.000,00	25-Aug-25	5	Rp 23.000,00	Rp 115.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 23.000,00	Rp -
486	0025	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Paperbag	-	25 Agustus 2025	900/1.3.3/166/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 18.000,00	Rp 90.000,00	25-Aug-25	5	Rp 18.000,00	Rp 90.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 18.000,00	Rp -
487	0025	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Thermal/Kertas Billing	SIDU	26 Agustus 2025	900/1.3.3/173/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 25.000,00	Rp 125.000,00	26-Aug-25	5	Rp 25.000,00	Rp 125.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 25.000,00	Rp -
488	0025	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Cup Kue Mika	Mika MMPG	02 September 2025	900/1.3.3/185/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 7.000,00	Rp 70.000,00	02-Sep-25	10	Rp 7.000,00	Rp 70.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 7.000,00	Rp -
489	0025	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Plastik	K OPP Plastik	02 September 2025	900/1.3.3/185/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	20	Rp 13.000,00	Rp 260.000,00	02-Sep-25	20	Rp 13.000,00	Rp 260.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 13.000,00	Rp -
490	0025	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Cup Kue Mika	-	08 September 2025	900/1.3.3/195/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 24.500,00	Rp 73.500,00	08-Sep-25	3	Rp 24.500,00	Rp 73.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 24.500,00	Rp -
491	0025	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Kantong Plastik	-	18 September 2025	900/1.3.3/206/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 34.000,00	Rp 102.000,00	18-Sep-25	3	Rp 34.000,00	Rp 102.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 34.000,00	Rp -
492	0025	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Cup Kue Mika Besar	-	24 September 2025	900/1.3.3/214/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	15	Rp 8.000,00	Rp 120.000,00	24-Sep-25	15	Rp 8.000,00	Rp 120.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 8.000,00	Rp -
493	0025	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Cup Kue Mika Sedang	-	24 September 2025	900/1.3.3/214/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	15	Rp 17.000,00	Rp 255.000,00	24-Sep-25	15	Rp 17.000,00	Rp 255.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 17.000,00	Rp -
494	0025	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Thermal/Kertas Billing	SIDU	29 September 2025	900/1.3.3/222/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 25.000,00	Rp 125.000,00	29-Sep-25	5	Rp 25.000,00	Rp 125.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 25.000,00	Rp -
495	0025	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Plast

NO		JENIS REKENING	NAMA BARANG	MEREK	PENERIMAAN					PENGELUARAN					SISA		
					Tanggal Terima	No/Tgl.Surat Dasar Penerimaan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Tanggal Keluar	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Peruntukan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2		3	4	5	6	7	8	9 (7x8)	10	11	12	13 (11x12)	14	15	16	17
530	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Mangkuk Gabus	Mangkuk Gabus Besar	17 Juni 2025	900/1.3.3/105/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 52.000,00	Rp 52.000,00	17-Jun-25	1	Rp 52.000,00	Rp 52.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 52.000,00	Rp -
531	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	PENCUCI PIRING	Telepon Sabun Batang	17 Juni 2025	900/1.13.3/106/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 3.500,00	Rp 35.000,00	17-Jun-25	10	Rp 3.500,00	Rp 35.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 3.500,00	Rp -
532	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Cup Gelas	Gelas Kertas 8oz Putih Motif	18 Juni 2025	900/1.13.3/112/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 14.000,00	Rp 28.000,00	18-Jun-25	2	Rp 14.000,00	Rp 28.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 14.000,00	Rp -
533	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Cup Gelas	Gelas Oval 16oz	18 Juni 2025	900/1.13.3/112/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 19.000,00	Rp 114.000,00	18-Jun-25	6	Rp 19.000,00	Rp 114.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 19.000,00	Rp -
534	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Cup Gelas	Gelas Oval 20oz	18 Juni 2025	900/1.13.3/112/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 22.000,00	Rp 132.000,00	18-Jun-25	6	Rp 22.000,00	Rp 132.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 22.000,00	Rp -
535	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Cup Gelas	Tutup Gelas Kertas 8oz	18 Juni 2025	900/1.13.3/112/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 12.000,00	Rp 24.000,00	18-Jun-25	2	Rp 12.000,00	Rp 24.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 12.000,00	Rp -
536	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Cup Gelas	Tutup Gelas Oval SB/Tiptop	18 Juni 2025	900/1.13.3/112/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	12	Rp 7.000,00	Rp 84.000,00	18-Jun-25	12	Rp 7.000,00	Rp 84.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 7.000,00	Rp -
537	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Jolly Tissue Pop Up 90gr	Jolly	18 Juni 2025	900/1.3.3/110/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 28.000,00	Rp 56.000,00	18-Jun-25	2	Rp 28.000,00	Rp 56.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 28.000,00	Rp -
538	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Sendok Plastik	Victory (Sendok Teh Warna 40)	30 Juli 2025	900/1.3.3/138/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 9.000,00	Rp 45.000,00	30-Jul-25	5	Rp 9.000,00	Rp 45.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 9.000,00	Rp -
539	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Cup Gelas	Gelas Oval 16oz (20x50)	30 Juli 2025	900/1.3.3/138/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 19.000,00	Rp 114.000,00	30-Jul-25	6	Rp 19.000,00	Rp 114.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 19.000,00	Rp -
540	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Cup Gelas	Gelas Oval 22oz (20x50)	30 Juli 2025	900/1.3.3/138/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 22.000,00	Rp 132.000,00	30-Jul-25	6	Rp 22.000,00	Rp 132.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 22.000,00	Rp -
541	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Wadah	Kotak	25 Agustus 2025	900/1.3.3/169/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 8.500,00	Rp 8.500,00	25-Aug-25	1	Rp 8.500,00	Rp 8.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 8.500,00	Rp -
542	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Wadah	Kotak	25 Agustus 2025	900/1.3.3/169/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 8.500,00	Rp 8.500,00	25-Aug-25	1	Rp 8.500,00	Rp 8.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 8.500,00	Rp -
543	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Sendok	Victory (Sendok Teh Warna 40)	25 Agustus 2025	900/1.3.3/169/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 9.000,00	Rp 45.000,00	25-Aug-25	5	Rp 9.000,00	Rp 45.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 9.000,00	Rp -
544	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Cup Mika	Klir Bowl	25 Agustus 2025	900/1.3.3/169/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	12	Rp 20.000,00	Rp 240.000,00	25-Aug-25	12	Rp 20.000,00	Rp 240.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 20.000,00	Rp -
545	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Cup gelas	Gelas	25 Agustus 2025	900/1.3.3/166/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 22.000,00	Rp 220.000,00	25-Aug-25	10	Rp 22.000,00	Rp 220.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 22.000,00	Rp -
546	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Gelas kertas	Gelas	25 Agustus 2025	900/1.3.3/166/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 19.000,00	Rp 190.000,00	25-Aug-25	10	Rp 19.000,00	Rp 190.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 19.000,00	Rp -
547	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Sabun Cair	Shinzui	27 Agustus 2025	900/1.3.3/178/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00	27-Aug-25	2	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00	Toko Selasih	0	Rp 5.000,00	Rp -
548	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Sabun Cair	Shinzui	27 Agustus 2025	900/1.3.3/178/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00	27-Aug-25	2	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00	Toko Selasih	0	Rp 5.000,00	Rp -
549	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Sabun Cair	Shinzui	27 Agustus 2025	900/1.3.3/178/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	27-Aug-25	1	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Toko Selasih	0	Rp 5.000,00	Rp -
550	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Sabun Cair	Shinzui	27 Agustus 2025	900/1.3.3/178/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	27-Aug-25	1	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Toko Selasih	0	Rp 5.000,00	Rp -
551	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Sabun Cair	Shinzui	27 Agustus 2025	900/1.3.3/178/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 5.000,00	Rp 20.000,00	27-Aug-25	4	Rp 5.000,00	Rp 20.000,00	Toko Selasih	0	Rp 5.000,00	Rp -
552	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Pembersih Lantai	Supersol Ref 750ml	08 September 2025	900/1.3.3/195/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 13.000,00	Rp 26.000,00	08-Sep-25	2	Rp 13.000,00	Rp 26.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 13.000,00	Rp -
553	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	PENCUCI PIRING	Mama Lemon Ref 1,5 lt	08 September 2025	900/1.3.3/195/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 19.500,00	Rp 39.000,00	08-Sep-25	2	Rp 19.500,00	Rp 39.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 19.500,00	Rp -
554	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Mangkuk Gabus	Mangkuk Gabus 7,5"	08 September 2025	900/1.3.3/195/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 62.000,00	Rp 62.000,00	08-Sep-25	1	Rp 62.000,00	Rp 62.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 62.000,00	Rp -
555	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Wadah	Alu Tray (50x10 pcs)	08 September 2025	900/1.3.3/196/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 21.000,00	Rp 105.000,00	08-Sep-25	5	Rp 21.000,00	Rp 105.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 21.000,00	Rp -
556	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Wadah	Bento Sekat 3 (6x50)	08 September 2025	900/1.3.3/196/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 80.000,00	Rp 80.000,00	08-Sep-25	1	Rp 80.000,00	Rp 80.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 80.000,00	Rp -
557	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Garpu	Garpu 7" Plastik Polos	08 September 2025	900/1.3.3/195/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 6.400,00	Rp 38.400,00	08-Sep-25	6	Rp 6.400,00	Rp 38.400,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 6.400,00	Rp -
558	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Sendok	Sendok 7" Plastik Polos	08 September 2025	900/1.3.3/195/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 6.400,00	Rp 38.400,00	08-Sep-25	6	Rp 6.400,00	Rp 38.400,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 6.400,00	Rp -
559	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Cup Mika	Klir Bowl 400ml (20x25)	15 September 2025	900/1.3.3/136/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 20.000,00	Rp 200.000,00	15-Sep-25	10	Rp 20.000,00	Rp 200.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 20.000,00	Rp -
560	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Sendok	Sendok Teh Bening 5"	15 September 2025	900/1.3.3/202/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00	15-Sep-25	2	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 5.000,00	Rp -
561	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Garpu	Garpu Plastik Htm - 7"	15 September 2025	900/1.3.3/201/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 6.500,00	Rp 6.500,00	15-Sep-25	1	Rp 6.500,00	Rp 6.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 6.500,00	Rp -
562	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Garpu	Garpu Plastik Panjang - 50	15 September 2025	900/1.3.3/201/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 6.500,00	Rp 6.500,00	15-Sep-25	1	Rp 6.500,00	Rp 6.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 6.500,00	Rp -
563	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Sendok	Sendok 7" Putih (40x50 Pcs)	15 September 2025	900/1.3.3/201/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 6.000,00	Rp 12.000,00	15-Sep-25	2	Rp 6.000,00	Rp 12.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 6.000,00	Rp -
564	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Cup gelas	Gelas Oval 220Z (20X50)	23 September 2025	900/1.13.3/210/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 22.000,00	Rp 132.000,00	23-Sep-25	6	Rp 22.000,00	Rp 132.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 22.000,00	Rp -
565	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Cup Gelas	Tutup Gelas Oval SB/TIPTOP (40X50)	23 September 2025	900/1.3.3/210/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	12	Rp 7.000,00	Rp 84.000,00	23-Sep-25	12	Rp 7.000,00	Rp 84.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 7.000,00	Rp -
566	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Tissue Pop Up	JOLLY TISSUE POP-UP -90G/10	23 September 2025	900/1.3.3/211/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 28.000,00	Rp 84.000,00	23-Sep-25	3	Rp 28.000,00	Rp 84.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 28.000,00	Rp -
567	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Cup Gelas	Gelas Oval 16OZ (20X50)	23 September 2025	900/1.3.3/210/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 19.000,00	Rp 114.000,00	23-Sep-25	6	Rp 19.000,00	Rp 114.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 19.000,00	Rp -
568	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Sendok	Sendok 5' (20 x50)	24 September 2025	900/1.3.3/214/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	8	Rp 6.500,00	Rp 52.000,00	24-Sep-25	8	Rp 6.500,00	Rp 52.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 6.500,00	Rp -
569	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Sendok	Sendok Chinese Bening (60x80)	24 September 2025	900/1.3.3/214/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	8	Rp 6.000,00	Rp 48.000,00	24-Sep-25	8	Rp 6.000,00	Rp 48.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 6.000,00	Rp -
570	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	PENCUCI PIRING	Sunlight Lime 1500 ml Ref	29 September 2025	900/1.3.3/221/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 23.000,00	Rp 69.000,00	29-Sep-25	3	Rp 23.000,00	Rp 69.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 23.000,00	Rp -
571	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	GELAS KERTAS 8 PUTIH MOTIF	GELAS	30 September 2025	900/1.3.3/223/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 14.000,00	Rp 28.000,00	30-Sep-25	2	Rp 14.000,00	Rp 28.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 14.000,00	Rp -
572	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Cup Gelas	(Tutup datar bening)	06 Oktober 2025	900/1.3.3/226/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	5	Rp 7.000,00	Rp 35.000,00	06-Oct-25	5	Rp 7.000,00	Rp 35.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 7.000,00	Rp -
573	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Wadah/Kotak	KOTAK POLOS 18 X 18	07 Oktober 2025	900/1.3.3/229/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	150	Rp 1.100,00	Rp 165.000,00	07-Oct-25	150	Rp 1.100,00	Rp 165.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 1.100,00	Rp -
574	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Kotak	KOTAK KRAFT 12 X 12	07 Oktober 2025	900/1.3.3/229/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 600,00	Rp 6.000,00	07-Oct-25	10	Rp 600,00	Rp 6.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 600,00	Rp -
575	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Sendok	SENDOK 7 INCI (40 X 50)	08 Oktober 2025	900/1.3.3/236/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 6.000,00	Rp 24.000,00	08-Oct-25	4	Rp 6.000,00	Rp 24.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 6.000,00	Rp -
576	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Pembersih Lantai	SUPER SOL REF 750 ml SEREH	09 Oktober 2025	900/1.3.3/226/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	1	Rp 13.000,00	Rp 13.000,00	09-Oct-25	1	Rp 13.000,00	Rp 13.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 13.000,00	Rp -
577	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Pencuci piring	MAMA LEMON 1,5 Ltr NPS	09 Oktober 2025	900/1.3.3/226/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	1	Rp 19.500,00	Rp 19.500,00	09-Oct-25	1	Rp 19.500,00	Rp 19.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 19.500,00	Rp -
578	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Wadah/Kotak	BOX MEGAT-18/TM-3	09 Oktober 2025	900/1.3.3/226/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	1	Rp 13.800,00	Rp 13.800,00	09-Oct-25	1	Rp 13.800,00	Rp 13.800,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 13.800,00	Rp -
579	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Wadah/Kotak	BOX MEGAT-18/TM-3	09 Oktober 2025	900/1.3.3/226/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	1	Rp 13.800,00	Rp 13.800,00	09-Oct-25	1	Rp 13.800,00	Rp 13.800,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 13.800,00	Rp -
580	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Wadah/Kotak	BOX MEGAT-18/TM-4	09 Oktober 2025	900/1.3.3/226/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	1	Rp 13.800,00	Rp 13.800,00	09-Oct-25	1	Rp 13.800,00	Rp 13.800,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 13.800,00	Rp -
581	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Sendok	Sendok 7"	11 Oktober 2025	900/1.13.3/254/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 6.000,00	Rp 6.000,00	11-Oct-25	1	Rp 6.000,00	Rp 6.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 6.000,00	Rp -
582	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Pembersih Lantai	Superpel REF 770ml	04 November 2025	900/1.3.3/269/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	1	Rp 21.800,00	Rp 21.800,00	04-Nov-25	1	Rp 21.800,00	Rp 21.800,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 21.800,00	Rp -
583	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Paperbag	Paperbag Grade Besar 125x130	04 November 2025	900/1.3.3/267/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 18.000,00	Rp 54.000,00	04-Nov-25	3	Rp 18.000,00	Rp 54.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 18.000,00	Rp -
584	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Pembersih Kaca	Cling Kaca (Ref Pouch - 400ml)	04 November 2025	900/1.3.3/269/BAST-BLUDSMKN2TPI/2032	5	Rp 3.600,00	Rp 18.000,00	04-Nov-25	5	Rp 3.600,00	Rp 18.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 3.600,00	Rp -
585	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	PENCUCI PIRING	MAMA LEMON REF 1500 JRK NIPIS	05 November 2025	900/1.3.3/274/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 18.955,00	Rp 18.955,00	05-Nov-25	1	Rp 18.955,00	Rp 18.955,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 18.955,00	Rp -
586	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	PENCUCI PIRING	MAMA LEMON REF 1500 JRK NIPIS	05 November 2025	900/1.3.3/274/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 18.955,00	Rp 18.955,00	05-Nov-25	1	Rp 18.955,00	Rp 18.955,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 18.955,00	Rp -
587	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Cup Mika	Kontener Klir Bowl 300ml (20x35)	19 November 2025	900/1.3.3/278/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 17.000,00	Rp 51.000,00	19-Nov-25	3	Rp 17.000,00	Rp 51.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 17.000,00	Rp -
588	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	PENCUCI PIRING	Sunlight Ref 900 ml LIME	19 November 2025	900/1.3.3/279/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 17.500,00	Rp 70.000,00	19-Nov-25	4	Rp 17.500,00	Rp 70.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 17.500,00	Rp -
589	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Sendok Plastik	Sendok Chinese Bening (60x80)	19 November 2025	900/1.3.3/279/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 6.000,00	Rp 60.000,00	19-Nov-25	10	Rp 6.000,00	Rp 60.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 6.000,00	Rp -
590	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Sendok Plastik	Sendok Teh 5" Bening (160x50)	19 November 2025	900/1.3.3/279/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 5.000,00	Rp 50.000,00	19-Nov-25	10	Rp 5.000,00	Rp 50.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 5.000,00	Rp -
591	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Sendok Plastik	Sendok Plastik Teh - 50	24 November 2025	900/1.3.3/286/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 6.000,00	Rp 12.000,00	24-Nov-25	2	Rp 6.000,00	Rp 12.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 6.000,00	Rp -
592	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Sendok Plastik	Sendok Jelly Bening	25 November 2025	900/1.3.3/285/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 3.000,00	Rp 15.000,00	25-Nov-25	5	Rp 3.000,00	Rp 15.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 3.000,00	Rp -
593	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Paperbag	Dollies Paperbag	03 Desember 2025	900/1.3.3/296/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 35.000,00	Rp 35.000,00	03-Dec-25	1	Rp 35.000,00	Rp 35.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 35.000,00	Rp -
594	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	PENCUCI PIRING	Ekonomi Power Liq 1500ml	03 Desember 2025	900/1.3.3/297/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 17.800,00	Rp 35.600,00	03-Dec-25	2	Rp 17.800,00	Rp 35.600,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 17.800,00	Rp -
595	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Wadah/Kotak	Kotak Kraf Tebal	03 Desember 2025	900/1.3.3/297/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	20	Rp 3.500,00	Rp 70.000,00	03-Dec-25	20	Rp 3.500,00	Rp 70.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 3.500,00	Rp -
596	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Sendok Plastik	SENDOK	04 Desember 2025	900/1.3.3/304/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 6.000,00	Rp 12.000,00	04-Dec-25	2	Rp 6.000,00	Rp 12.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 6.000,00	Rp -
597	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Pembersih Lantai	SOKLIN LANTAI REF	04 Desember 2025	900/1.3.3/304/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 10.700,00	Rp 21.400,00	04-Dec-25	2	Rp 10.700,00	Rp 21.400,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 10.700,00	Rp -
598	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Wadah/Kotak	Box Megat T-18 (1500 pcs)	07 Desember 2025	900/1.3.3/310/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 13.800,00	Rp 82.800,00	07-Dec-25	6	Rp 13.800,00	Rp 82.800,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 13.800,00	Rp -
599	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Sendok Plastik	Sendok 7" (Box)	07 Desember 2025	900/1.3.3/310/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 6.000,00	Rp 24.000,00	07-Dec-25	4	Rp 6.000,00	Rp 24.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 6.000,00	Rp -
600	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Wadah/Kotak	Kotak Kraft (Kotak Nasi) 18x18	09 Desember 2025	900/1.3.3/324/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 113.000,00	Rp 113.000,00	09-Dec-25	1	Rp 113.000,00	Rp 113.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 113.000,00	Rp -
601	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Sendok	Sendok 7" (40x50)	09 Desember 2025	900/1.3.3/324/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 6.000,00	Rp 30.000,00	09-Dec-25	5	Rp 6.000,00	Rp 30.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 6.000,00	Rp -
602	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Sendok Teh 5" Bening (160x50)	Sendok 5" (20x50)	13 Desember 2025	900/1.3.3/341/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 6.500,00	Rp 6.500,00	13-Dec-25	1	Rp 6.500,00	Rp 6.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 6.500,00	Rp -
603	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Tissue Pop Up	Jolly	23 Desember 2025	900/1.3.3/362/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 273.000,00	Rp 273.000,00	23-Dec-25	0	Rp 273.000,00	Rp -	Tefa Kuliner/Coffee Shop	1	Rp 273.000,00	Rp 273.000,00
604	0030	Belanja Bahan/Alat Utk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Pembersih Lantai	Soklin Lantai JRG-4000 Sereh	23

NO		JENIS REKENING	NAMA BARANG	MEREK	PENERIMAAN					PENGELUARAN					SISA		
					Tanggal Terima	No/Tgl.Surat Dasar Penerimaan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Tanggal Keluar	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Peruntukan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2		3	4	5	6	7	8	9 (7x8)	10	11	12	13 (11x12)	14	15	16	17
643	0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	Minuman Teh	Teh Pucuk Botol 350ml	22 September 2025	900/1.3.3/208/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 67.000,00	Rp 67.000,00	22-Sep-25	1	Rp 67.000,00	Rp 67.000,00	TOKO SELASIH	0	Rp 67.000,00	Rp -
644	0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	Wafer	Wafer Beng-beng	22 September 2025	900/1.3.3/208/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 286.000,00	Rp 286.000,00	22-Sep-25	1	Rp 286.000,00	Rp 286.000,00	TOKO SELASIH	0	Rp 286.000,00	Rp -
645	0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	Minuman coffe	Golda Coffee Botol	22 September 2025	900/1.3.3/208/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 38.000,00	Rp 152.000,00	22-Sep-25	4	Rp 38.000,00	Rp 152.000,00	TOKO SELASIH	0	Rp 38.000,00	Rp -
646	0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	SPRITE BOTOL	SPRITE BOTOL -(1)390/12	23 September 2025	900/1.3.3/211/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 50.000,00	Rp 150.000,00	23-Sep-25	3	Rp 50.000,00	Rp 150.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 50.000,00	Rp -
647	0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	Minyak Goreng	Minyak Sunco Ref 2 Ltr	24 September 2025	900/1.3.3/213/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 235.000,00	Rp 235.000,00	24-Sep-25	1	Rp 235.000,00	Rp 235.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 235.000,00	Rp -
648	0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	MINYAK GORENG	MINYAK SUNCO 2 LTR	11 Oktober 2025	900/1.3.3/250/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 41.000,00	Rp 41.000,00	11-Oct-25	1	Rp 41.000,00	Rp 41.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 41.000,00	Rp -
649	0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	Tissue	Jolly	04 November 2025	900/1.3.3/269/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 28.000,00	Rp 56.000,00	04-Nov-25	2	Rp 28.000,00	Rp 56.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 28.000,00	Rp -
650	0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	Minyak Goreng	Minyak Sunco Ref 2lt	23 November 2025	900/1.3.3/293/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 39.500,00	Rp 118.500,00	23-Nov-25	3	Rp 39.500,00	Rp 118.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 39.500,00	Rp -
651	0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	Minyak Goreng	Minyak Sunco Ref 2 lt	24 November 2025	900/1.3.3/282/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 39.500,00	Rp 79.000,00	24-Nov-25	2	Rp 39.500,00	Rp 79.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 39.500,00	Rp -
652	0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	MINYAK GORENG	MINYAK SUNCO	04 Desember 2025	900/1.3.3/304/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 40.000,00	Rp 40.000,00	04-Dec-25	1	Rp 40.000,00	Rp 40.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 40.000,00	Rp -
653	0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	Minyak Goreng	Minyak Sunco Ref 2 lt	07 Desember 2025	900/1.3.3/310/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 236.000,00	Rp 236.000,00	07-Dec-25	1	Rp 236.000,00	Rp 236.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 236.000,00	Rp -
654	0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	Sprite Botol	Sprite Botol 390/12	23 Desember 2025	900/1.3.3/361/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	11	Rp 50.000,00	Rp 550.000,00	23-Dec-25	0	Rp 50.000,00	Rp -	Tefa Kuliner/Coffee Shop	11	Rp 50.000,00	Rp 550.000,00
655	0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	Minuman Bersoda	COCA-COLA BOTOL	23 Desember 2025	900/1.3.3/353/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 50.000,00	Rp 100.000,00	23-Dec-25	0	Rp 50.000,00	Rp -	TOKO SELASIH	2	Rp 50.000,00	Rp 100.000,00
656	0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	Minuman Bersoda	FANTA ORANGE	23 Desember 2025	900/1.3.3/353/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00	23-Dec-25	0	Rp 50.000,00	Rp -	TOKO SELASIH	1	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00
657	0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	Golda Coffee	GOLDA LATTE COFFE	23 Desember 2025	900/1.3.3/353/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 39.000,00	Rp 234.000,00	23-Dec-25	0	Rp 39.000,00	Rp -	TOKO SELASIH	6	Rp 39.000,00	Rp 234.000,00
658	0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	Minuman Teh Kotak	TEH SOSRO KOTAK	23 Desember 2025	900/1.3.3/353/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 58.000,00	Rp 232.000,00	23-Dec-25	0	Rp 58.000,00	Rp -	TOKO SELASIH	4	Rp 58.000,00	Rp 232.000,00
659	0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	Sprite/Minuman Besrsoda	SPRITE	23 Desember 2025	900/1.3.3/353/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00	23-Dec-25	0	Rp 50.000,00	Rp -	TOKO SELASIH	1	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00
660	0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	Minuman Teh Botol	Teh Pucuk Botol 350ml	23 Desember 2025	900/1.3.3/353/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 66.000,00	Rp 132.000,00	23-Dec-25	0	Rp 66.000,00	Rp -	TOKO SELASIH	2	Rp 66.000,00	Rp 132.000,00
661	0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	Wafer Coketat	BENG-BENG	24 Desember 2025	900/1.3.3/372/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 285.000,00	Rp 285.000,00	24-Dec-25	0	Rp 285.000,00	Rp -	TOKO SELASIH	1	Rp 285.000,00	Rp 285.000,00
662	0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	Minuman Jeruk/Floridina	FLORIDINA 350 ML	24 Desember 2025	900/1.3.3/372/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 34.000,00	Rp 68.000,00	24-Dec-25	0	Rp 34.000,00	Rp -	TOKO SELASIH	2	Rp 34.000,00	Rp 68.000,00
663	0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	Pembalut	CBF EXTRA	24 Desember 2025	900/1.3.3/372/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 20.500,00	Rp 20.500,00	24-Dec-25	0	Rp 20.500,00	Rp -	TOKO SELASIH	1	Rp 20.500,00	Rp 20.500,00
664	0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	Pembalut	CHARM COOLING FRESH NIGHT WI	24 Desember 2025	900/1.3.3/372/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 28.000,00	Rp 56.000,00	24-Dec-25	0	Rp 28.000,00	Rp -	TOKO SELASIH	2	Rp 28.000,00	Rp 56.000,00
665	0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	Sprite Botol	Sprite Botol 390/12	29 Desember 2025	900/1.3.3/385/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 50.000,00	Rp 150.000,00	29-Dec-25	0	Rp 50.000,00	Rp -	Tefa Kuliner/Coffee Shop	3	Rp 50.000,00	Rp 150.000,00
666	0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	Minyak Goreng	MINYAK FORTUNER	29 Desember 2025	900/1.3.3/385/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 248.000,00	Rp 496.000,00	29-Dec-25	0	Rp 248.000,00	Rp -	Tefa Kuliner/Coffee Shop	2	Rp 248.000,00	Rp 496.000,00
									Rp 6.500.506,00				Rp 4.077.006,00				Rp 2.423.500,00
667	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kopi Bubuk	Kapal Tanker	18 Februari 2025	900/1.13.1/007/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 440.000,00	Rp 440.000,00	18-Feb-25	1	Rp 440.000,00	Rp 440.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 440.000,00	Rp -
668	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Gula merah 1000gr	-	18 Februari 2025	900/1.13.1/005/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 28.000,00	Rp 56.000,00	18-Feb-25	2	Rp 28.000,00	Rp 56.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 28.000,00	Rp -
669	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Cokelat Bubuk	IPAS Drink Dark Chocolate	18 Februari 2025	900/1.13.1/005/BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 26.000,00	Rp 78.000,00	18-Feb-25	3	Rp 26.000,00	Rp 78.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 26.000,00	Rp -
670	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Creamer	Nestle Coffeemate 450gr	18 Februari 2025	900/1.13.1/005/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 33.500,00	Rp 67.000,00	18-Feb-25	2	Rp 33.500,00	Rp 67.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 33.500,00	Rp -
671	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Susu Cair	UHT Diamond	18 Februari 2025	900/1.13.1/008/BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 197.000,00	Rp 788.000,00	18-Feb-25	4	Rp 197.000,00	Rp 788.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 197.000,00	Rp -
672	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Teh Celup 100	Prendjak	18 Februari 2025	900/1.13.1/009/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00	18-Feb-25	1	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 20.000,00	Rp -
673	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Gula Pasir Kemasan	-	18 Februari 2025	900/1.13.1/009/BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 14.500,00	Rp 43.500,00	18-Feb-25	3	Rp 14.500,00	Rp 43.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 14.500,00	Rp -
674	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Jeruk Nipis	-	18 Februari 2025	900/1.13.1/009/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 8.288,00	Rp 8.288,00	18-Feb-25	1	Rp 8.288,00	Rp 8.288,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 8.288,00	Rp -
675	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Gula Halus 500gr	Claris	18 Februari 2025	900/1.13.1/009/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 16.500,00	Rp 16.500,00	18-Feb-25	1	Rp 16.500,00	Rp 16.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 16.500,00	Rp -
676	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Syrup Strawberry	Marjan	18 Februari 2025	900/1.13.1/009/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 25.500,00	Rp 25.500,00	18-Feb-25	1	Rp 25.500,00	Rp 25.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 25.500,00	Rp -
677	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Syrup Mocca	Marjan	18 Februari 2025	900/1.13.1/009/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 25.500,00	Rp 25.500,00	18-Feb-25	1	Rp 25.500,00	Rp 25.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 25.500,00	Rp -
678	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Syrup Strawberry	Marjan	18 Februari 2025	900/1.13.1/009/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 25.500,00	Rp 25.500,00	18-Feb-25	1	Rp 25.500,00	Rp 25.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 25.500,00	Rp -
679	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Syrup Vanilla	Marjan	18 Februari 2025	900/1.13.1/009/BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 25.500,00	Rp 153.000,00	18-Feb-25	6	Rp 25.500,00	Rp 153.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 25.500,00	Rp -
680	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Syrup Mocca	Marjan	18 Februari 2025	900/1.13.1/009/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 25.500,00	Rp 25.500,00	18-Feb-25	1	Rp 25.500,00	Rp 25.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 25.500,00	Rp -
681	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Sedotan	Pipet Goldenstraw	18 Februari 2025	900/1.13.1/013/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	18-Feb-25	1	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 25.000,00	Rp -
682	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Sedotan	Pipet Stirer	18 Februari 2025	900/1.13.1/013/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 4.000,00	Rp 4.000,00	18-Feb-25	1	Rp 4.000,00	Rp 4.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 4.000,00	Rp -
683	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Tissue Pocket	Tessa F. Hanky TPC-25 10'	22 Februari 2025	900/1.13.1/024/BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 5.500,00	Rp 33.000,00	22-Feb-25	6	Rp 5.500,00	Rp 33.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 5.500,00	Rp -
684	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Toples	Toples SP 8000	18 Maret 2025	900/1.13.1/031/BLUDSMKN2TPI/2025	15	Rp 11.500,00	Rp 172.500,00	18-Mar-25	15	Rp 11.500,00	Rp 172.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 11.500,00	Rp -
685	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	TELUR AYAM	-	18 Maret 2025	900/1.13.1/031/BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 52.000,00	Rp 156.000,00	18 Maret 2025	3	Rp 52.000,00	Rp 156.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 52.000,00	Rp -
686	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Ikan/Daging	-	18 Maret 2025	900/1.13.1/031/BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 15.000,00	Rp 150.000,00	18 Maret 2025	10	Rp 15.000,00	Rp 150.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 15.000,00	Rp -
687	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	TEPUNG KANJI	-	18 Maret 2025	900/1.13.1/031/BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 10.200,00	Rp 30.600,00	18 Maret 2025	3	Rp 10.200,00	Rp 30.600,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 10.200,00	Rp -
688	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	MENTEGA	Royal Palmia	18 Maret 2025	900/1.13.1/031/BLUDSMKN2TPI/2025	15	Rp 8.600,00	Rp 129.000,00	18 Maret 2025	15	Rp 8.600,00	Rp 129.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 8.600,00	Rp -
689	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	TEPUNG	Segitiga Biru	18 Maret 2025	900/1.13.1/031/BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 12.200,00	Rp 61.000,00	18 Maret 2025	5	Rp 12.200,00	Rp 61.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 12.200,00	Rp -
690	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	BAWANG PUTIH /PACK 500gr	-	18 Maret 2025	900/1.13.1/031/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 19.500,00	Rp 39.000,00	18 Maret 2025	2	Rp 19.500,00	Rp 39.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 19.500,00	Rp -
691	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	NANAS	-	18 Maret 2025	900/1.13.1/031/BLUDSMKN2TPI/2025	4,912	Rp 20.500,00	Rp 100.696,00	18 Maret 2025	4,912	Rp 20.500,00	Rp 100.696,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 20.500,00	Rp -
692	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Susu Cair	Diamond Milk Fullcream 1000	21 April 2025	900/1.13.1/044/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 208.000,00	Rp 208.000,00	21-Apr-25	1	Rp 208.000,00	Rp 208.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 208.000,00	Rp -
693	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Biji Kopi	Kapal Tanker	21 April 2025	900/1.13.1/047/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 360.000,00	Rp 360.000,00	21-Apr-25	1	Rp 360.000,00	Rp 360.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 360.000,00	Rp -
694	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Suyrup Strawberry	Marjan	21 April 2025	900/1.13.1/047/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 25.500,00	Rp 51.000,00	21-Apr-25	2	Rp 25.500,00	Rp 51.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 25.500,00	Rp -
695	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Syrup Vanilla	Marjan	21 April 2025	900/1.13.1/047/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 25.500,00	Rp 51.000,00	21-Apr-25	2	Rp 25.500,00	Rp 51.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 25.500,00	Rp -
696	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Syrup Mocca	Marjan	21 April 2025	900/1.13.1/047/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 25.500,00	Rp 51.000,00	21-Apr-25	2	Rp 25.500,00	Rp 51.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 25.500,00	Rp -
697	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Teh Celup 100	Prendjak	21 April 2025	900/1.13.1/047/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00	21-Apr-25	1	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 20.000,00	Rp -
698	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Jeruk Nipis	-	21 April 2025	900/1.13.1/047/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 10.005,00	Rp 10.005,00	21-Apr-25	1	Rp 10.005,00	Rp 10.005,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 10.005,00	Rp -
699	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Creamer	Nestle Coffeemate 450gr	21 April 2025	900/1.13.1/041/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 33.500,00	Rp 67.000,00	21-Apr-25	2	Rp 33.500,00	Rp 67.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 33.500,00	Rp -
700	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Gula Aren Bubuk	Ricoman Palm Sugar 400gr	21 April 2025	900/1.13.1/041/BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 20.500,00	Rp 102.500,00	21-Apr-25	5	Rp 20.500,00	Rp 102.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 20.500,00	Rp -
701	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Susu Cair	UHT Diamond	21 April 2025	900/1.13.1/041/BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 197.000,00	Rp 591.000,00	21-Apr-25	3	Rp 197.000,00	Rp 591.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 197.000,00	Rp -
702	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Sedotan	Pipet Striter 12cm	21 April 2025	900/1.13.1/042/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 4.000,00	Rp 4.000,00	21-Apr-25	1	Rp 4.000,00	Rp 4.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 4.000,00	Rp -
703	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Sedotan	Pipet Super Bubble Hitam	21 April 2025	900/1.13.1/042/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	21-Apr-25	1	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 25.000,00	Rp -
704	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Tepung Maizena	Baker King 500gr	22 April 2025	900/1.13.1/052/BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 15.700,00	Rp 78.500,00	22-Apr-25	5	Rp 15.700,00	Rp 78.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 15.700,00	Rp -
705	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Minyak Goreng Refill 2lt	Sunco	22 April 2025	900/1.13.1/052/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 258.500,00	Rp 258.500,00	22-Apr-25	1	Rp 258.500,00	Rp 258.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 258.500,00	Rp -
706	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Minyak Goreng Refill 2lt	Sunco	22 April 2025	900/1.13.1/052/BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 43.500,00	Rp 174.000,00	22-Apr-25	4	Rp 43.500,00	Rp 174.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 43.500,00	Rp -
707	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Ragi	Tepung Saf Instan 500gr	22 April 2025	900/1.13.1/052/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 60.000,00	Rp 120.000,00	22-Apr-25	2	Rp 60.000,00	Rp 120.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 60.000,00	Rp -
708	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Tepung Terigu	Cakra Kembar 1 kg	22 April 2025	900/1.13.1/052/BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 142.000,00	Rp 568.000,00	22-Apr-25	4	Rp 142.000,00	Rp 568.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 142.000,00	Rp -
709	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Tepung Terigu	Segitiga Biru 1 kg	22 April 2025	900/1.13.1/052/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 143.200,00	Rp 286.400,00	22-Apr-25	2	Rp 143.200,00	Rp 286.400,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 143.200,00	Rp -
710	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Telur Ayam No. 2	-	22 April 2025	900/1.13.1/052/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 252.000,00	Rp 504.000,00	22-Apr-25	2	Rp 252.000,00	Rp 504.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 252.000,00	Rp -
711	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Agar2 Powder/Bubuk	Nutrigel	22 April 2025	900/1.13.1/052/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 64.500,00	Rp 129.000,00	22-Apr-25	2	Rp 64.500,00	Rp 129.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 64.500,00	Rp -
712	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Agar2 Powder/Bubuk	Nutrigel	22 April 2025	900/1.13.1/052/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 64.500,00	Rp 129.000,00	22-Apr-25	2	Rp 64.500,00	Rp 129.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 64.500,00	Rp -
713	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Agar2 Powder/Bubuk	Nutrigel	22 April 2025	900/1.13.1/052/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 64.500,00	Rp 129.000,00	22-Apr-25	2	Rp 64.500,00	Rp 129.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 64.500,00	Rp -
714	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Agar2 Powder/Bubuk	Nutrigel	22 April 2025	900/1.13.1/052/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 64.500,00	Rp 129.000,00	22-Apr-25	2	Rp 64.500,00	Rp 129.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 64.500,00	Rp -
715	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Meses	Meses Asw Coklat /P 1kg	22 April 2025	900/1.13.1/052/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 26.500,00	Rp 53.000,00	22-Apr-25	2	Rp 26.500,00	Rp 53.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 26.500,00	Rp -
716	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Bubuk Coklat Kiloan 250gr	-	22 April 2025	900/1.13.1/052/BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 12.000,00	Rp 48.000,00	22-Apr-25	4	Rp 12.000,00	Rp 48.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 12.000,00	Rp -
717	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Susu Kental Manis	SKM Dairy Charm Pillow	22 April 2025	900/1.13.1/052/BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 57.000,00	Rp 171.000,00	22-Apr-25	3	Rp 57.000,00	Rp 171.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 57.000,00	Rp -
718	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	KP. SP 70gr (Powder Kue)	-	22 April 2025	900/1.13.1/052/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 14.000,00	Rp 28.000,00	22-Apr-25	2	Rp 14.000,00	Rp 28.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 14.000,00	Rp -
719	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Saos Sambal SCH	ABC Sambal	22 April 2025	900/1.13.1/052/BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 8.100,00	Rp 40.500,00	22-Apr-25	5	Rp 8.100,00	Rp 40.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 8.100,00	Rp -
720	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Saos Sambal	ABC Sambal Extra Pedas	22 April 2025	900/1.13.1/052/BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 30.500,00	Rp 152.500,00	22-Apr-25	5	Rp 30.500,00	Rp 152.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 30.500,00	Rp -
721	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Garam	Dolphin	22 April 2025	900/1.13.1/052/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 15.500,00	Rp 31.000,00	22-Apr-25	2	Rp 15.500,00	Rp 31.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 15.500,00	Rp -
722	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Keju	Whinzees Food Service 2kg	22 April 2025	900/1.13.1/052/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 68.000,00	Rp 68.000,00	22-Apr-25	1	Rp 68.000,00	Rp 68.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 68.000,00	Rp -
723	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Keju Cheddar	Whinzees Keju Cheddar 250gr	22 April 2025	900/1.13.1/052/BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 97.000,00	Rp 388.000,00	22-Apr-25	4	Rp 97.000,00	Rp 388.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 97.000,00	Rp -
724	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Sosis Ayam	Seara	22 April 2025	900/1.13.1/052/BLUDSMKN2TPI/2025	19	Rp 14.500,00	Rp 275.500,00	22-Apr-25	19	Rp 14.500,00	Rp 275.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 14.500,00	Rp -
725	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kopi Sachet	Nescafe 3in1 Ori 17,5gr	22 April 2025	900/1.13.1/052/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 109.200,00	Rp 109.200,00	22-Apr-25	1	Rp 109.200,00	Rp 109.200,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 109.200,00	Rp -
726	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Gula Halus	Claris	22 April 2025	900/1.13.1/052/BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 13.200,

NO	JENIS REKENING		NAMA BARANG	MEREK	PENERIMAAN					PENGELUARAN					SISA		
					Tanggal Terima	No/Tgl.Surat Dasar Penerimaan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Tanggal Keluar	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Peruntukan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2		3	4	5	6	7	8	9 (7x8)	10	11	12	13 (11x12)	14	15	16	17
757	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Pasta Cokelat	Tekomas Filling Coklat 500gr	14 Mei 2025	900/1.13.3/065/BLUDSMKN2TPI/2025	8	Rp 15.500,00	Rp 124.000,00	14-May-25	8	Rp 15.500,00	Rp 124.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 15.500,00	Rp -
758	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Bubuk Coklat Kiloan 250gr	Bubuk Coklat Kiloan 250gr	14 Mei 2024	900/1.13.3/066/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 12.000,00	Rp 24.000,00	14-May-24	2	Rp 12.000,00	Rp 24.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 12.000,00	Rp -
759	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Pembalut	Softex 23cm Daun Sirih (20P)	19 Mei 2025	900/1.13.1/068/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 16.500,00	Rp 16.500,00	19-May-25	1	Rp 16.500,00	Rp 16.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 16.500,00	Rp -
760	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Pembalut	Softex 23cm Daun Sirih (30P)	19 Mei 2025	900/1.13.1/068/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 22.000,00	Rp 22.000,00	19-May-25	1	Rp 22.000,00	Rp 22.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 22.000,00	Rp -
761	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Susu Cair	Diamond	19 Mei 2025	900/1.13.1/069/BLUDSMKN2TPI/2025	8	Rp 208.000,00	Rp 1.664.000,00	19-May-25	8	Rp 208.000,00	Rp 1.664.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 208.000,00	Rp -
762	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Biji Kopi	Kapal Tanker	19 Mei 2025	900/1.13.1/069/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 1.100.000,00	Rp 1.100.000,00	19-May-25	1	Rp 1.100.000,00	Rp 1.100.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 1.100.000,00	Rp -
763	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Jolly Tissu Pop Up	Jolly	19 Mei 2025	900/1.13.1/069/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 28.000,00	Rp 28.000,00	19-May-25	1	Rp 28.000,00	Rp 28.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 28.000,00	Rp -
764	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Gula Halus	-	19 Mei 2025	900/1.13.1/069/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 12.000,00	Rp 12.000,00	19-May-25	1	Rp 12.000,00	Rp 12.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 12.000,00	Rp -
765	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Teh Celup100	Prendjak	19 Mei 2025	900/1.13.1/069/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00	19-May-25	1	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 20.000,00	Rp -
766	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Jeruk Sambal	-	19 Mei 2025	900/1.13.1/069/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 8.108,00	Rp 8.108,00	19-May-25	1	Rp 8.108,00	Rp 8.108,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 8.108,00	Rp -
767	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Jeruk Sambal	-	19 Mei 2025	900/1.13.1/069/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 8.798,00	Rp 17.596,00	19-May-25	2	Rp 8.798,00	Rp 17.596,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 8.798,00	Rp -
768	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Gula Aren Bubuk	Ricoman Palm Sugar 100gr	19 Mei 2025	900/1.13.1/070/BLUDSMKN2TPI/2025	12	Rp 22.000,00	Rp 264.000,00	19-May-25	12	Rp 22.000,00	Rp 264.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 22.000,00	Rp -
769	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Creamer	Nestle Coffeemate 450gr	19 Mei 2025	900/1.13.1/070/BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 33.500,00	Rp 134.000,00	19-May-25	4	Rp 33.500,00	Rp 134.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 33.500,00	Rp -
770	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Sedotan	Pipet Goldenstraw 620	19 Mei 2025	900/1.13.1/072/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 33.000,00	Rp 33.000,00	19-May-25	1	Rp 33.000,00	Rp 33.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 33.000,00	Rp -
771	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Sedotan	Pipet Stirer 12cm	19 Mei 2025	900/1.13.1/072/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 4.000,00	Rp 4.000,00	19-May-25	1	Rp 4.000,00	Rp 4.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 4.000,00	Rp -
772	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Tissue Jolly 250s	Jolly	26 Mei 2025	900/1.13.1/088/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 8.500,00	Rp 17.000,00	26-May-25	2	Rp 8.500,00	Rp 17.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 8.500,00	Rp -
773	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Jeruk	Jeruk Medan	26 Mei 2025	900/1.13.1/089/BLUDSMKN2TPI/2025	8	Rp 23.000,00	Rp 184.000,00	26-May-25	8	Rp 23.000,00	Rp 184.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 23.000,00	Rp -
774	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kacang Panjang KY	-	26 Mei 2025	900/1.13.1/085/BLUDSMKN2TPI/2025	2,562	Rp 15.000,00	Rp 38.430,00	26-May-25	2,562	Rp 15.000,00	Rp 38.430,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 15.000,00	Rp -
775	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Sayur Kol Utuh	-	26 Mei 2025	900/1.13.1/086/BLUDSMKN2TPI/2025	3,8	Rp 9.000,00	Rp 34.200,00	26-May-25	3,8	Rp 9.000,00	Rp 34.200,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 9.000,00	Rp -
776	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Ayam Utuh	-	26 Mei 2025	900/1.13.1/086/BLUDSMKN2TPI/2025	9	Rp 38.000,00	Rp 342.000,00	26-May-25	9	Rp 38.000,00	Rp 342.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 38.000,00	Rp -
777	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Cabe Merah /Kg	-	26 Mei 2025	900/1.13.1/086/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 52.000,00	Rp 52.000,00	26-May-25	1	Rp 52.000,00	Rp 52.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 52.000,00	Rp -
778	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Cabe Nano	-	26 Mei 2025	900/1.13.1/086/BLUDSMKN2TPI/2025	0,25	Rp 52.000,00	Rp 13.000,00	26-May-25	0,25	Rp 52.000,00	Rp 13.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 52.000,00	Rp -
779	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Cabe Kering /Pack 500gr	-	26 Mei 2025	900/1.13.1/090/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 31.300,00	Rp 62.600,00	26-May-25	2	Rp 31.300,00	Rp 62.600,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 31.300,00	Rp -
780	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Cabe Kering /Pack 100gr	-	26 Mei 2025	900/1.13.1/090/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 6.800,00	Rp 6.800,00	26-May-25	1	Rp 6.800,00	Rp 6.800,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 6.800,00	Rp -
781	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Wortel	-	26 Mei 2025	900/1.13.1/090/BLUDSMKN2TPI/2025	1,5	Rp 17.000,00	Rp 25.500,00	26-May-25	1,5	Rp 17.000,00	Rp 25.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 17.000,00	Rp -
782	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Minyak Goreng Refff 2lt	Minyak Fortune Refff 2lt	26 Mei 2025	900/1.13.1/090/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 39.900,00	Rp 39.900,00	26-May-25	1	Rp 39.900,00	Rp 39.900,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 39.900,00	Rp -
783	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Bawang Merah India /Pck 500gr	-	26 Mei 2025	900/1.13.1/090/BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 8.700,00	Rp 34.800,00	26-May-25	4	Rp 8.700,00	Rp 34.800,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 8.700,00	Rp -
784	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kerupuk	Ceriping Kelinci 500gr	26 Mei 2025	900/1.13.1/090/BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 15.000,00	Rp 60.000,00	26-May-25	4	Rp 15.000,00	Rp 60.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 15.000,00	Rp -
785	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Bawang Bombay /Pck 500gr	-	26 Mei 2025	900/1.13.1/090/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 11.000,00	Rp 11.000,00	26-May-25	1	Rp 11.000,00	Rp 11.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 11.000,00	Rp -
786	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Bawang Putih /Pck 250gr	-	26 Mei 2025	900/1.13.1/090/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 8.800,00	Rp 17.600,00	26-May-25	2	Rp 8.800,00	Rp 17.600,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 8.800,00	Rp -
787	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Susu Kental Manis	Dairy Charm Pillow 2,5kg	26 Mei 2025	900/1.13.1/091/BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 57.000,00	Rp 228.000,00	26-May-25	4	Rp 57.000,00	Rp 228.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 57.000,00	Rp -
788	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Gula Merah	Etang 10kg /Pck 500gr	26 Mei 2025	900/1.13.1/091/BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 15.000,00	Rp 60.000,00	26-May-25	4	Rp 15.000,00	Rp 60.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 15.000,00	Rp -
789	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Keju Cheddar 2kg	Whincheez Keju Cheddar 2kg	26 Mei 2025	900/1.13.1/091/BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 70.000,00	Rp 280.000,00	26-May-25	4	Rp 70.000,00	Rp 280.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 70.000,00	Rp -
790	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Sosis Ayam	Jofran 360gr	26 Mei 2025	900/1.13.1/091/BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 15.500,00	Rp 155.000,00	26-May-25	10	Rp 15.500,00	Rp 155.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 15.500,00	Rp -
791	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Tepung Terigu	Cakra Kembar Eko 1kg	26 Mei 2025	900/1.13.1/091/BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 142.000,00	Rp 426.000,00	26-May-25	3	Rp 142.000,00	Rp 426.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 142.000,00	Rp -
792	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Mentega	Royal Palmia 200gr	26 Mei 2025	900/1.13.1/091/BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 509.000,00	Rp 1.527.000,00	26-May-25	3	Rp 509.000,00	Rp 1.527.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 509.000,00	Rp -
793	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Garam	Bintang Rantai	26 Mei 2025	900/1.13.1/091/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 8.600,00	Rp 8.600,00	26-May-25	1	Rp 8.600,00	Rp 8.600,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 8.600,00	Rp -
794	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Ajinomoto 250gr	Ajinomoto 250gr	26 Mei 2025	900/1.13.1/091/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 13.200,00	Rp 13.200,00	26-May-25	1	Rp 13.200,00	Rp 13.200,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 13.200,00	Rp -
795	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Tempe Potong	Tempe Potong	27 Mei 2025	900/1.13.1/095/BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 4.000,00	Rp 16.000,00	27-May-25	4	Rp 4.000,00	Rp 16.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 4.000,00	Rp -
796	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Santan	-	27 Mei 2025	900/1.13.1/098/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 35.000,00	Rp 35.000,00	27-May-25	1	Rp 35.000,00	Rp 35.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 35.000,00	Rp -
797	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Selai (4 x 5Kg)	Dunia Filling CB 4 x 5Kg	31 Mei 2025	900/1.13.1/100/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 488.000,00	Rp 488.000,00	31-May-25	1	Rp 488.000,00	Rp 488.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 488.000,00	Rp -
798	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Selai 5Kg	Dunia Filling CB 5Kg	31 Mei 2025	900/1.13.1/100/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 127.000,00	Rp 254.000,00	31-May-25	2	Rp 127.000,00	Rp 254.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 127.000,00	Rp -
799	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Selai 5kg	LePatta Blue 5kg	31 Mei 2025	900/1.13.1/100/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 87.000,00	Rp 174.000,00	31-May-25	2	Rp 87.000,00	Rp 174.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 87.000,00	Rp -
800	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Bihun Segitiga Rantai	Segitiga Rantai	17 Juni 2025	900/1.13.1/103/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 110.000,00	Rp 110.000,00	17-Jun-25	1	Rp 110.000,00	Rp 110.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 110.000,00	Rp -
801	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kecap Manis	Kecap ABC Manis Ref 825ml	17 Juni 2025	900/1.13.1/103/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 26.000,00	Rp 52.000,00	17-Jun-25	2	Rp 26.000,00	Rp 52.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 26.000,00	Rp -
802	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kentang	-	17 Juni 2025	900/1.13.1/103/BLUDSMKN2TPI/2025	2,15	Rp 20.951,00	Rp 45.045,00	17-Jun-25	2,15	Rp 20.951,00	Rp 45.045,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 20.951,00	Rp -
803	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Jeruk Sambal	-	17 Juni 2025	900/1.13.1/103/BLUDSMKN2TPI/2025	0,97	Rp 26.938,00	Rp 26.130,00	17-Jun-25	0,97	Rp 26.938,00	Rp 26.130,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 26.938,00	Rp -
804	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Minyak Sunco Ref 1lt	Sunco Ref 1lt	17 Juni 2025	900/1.13.1/103/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 22.500,00	Rp 22.500,00	17-Jun-25	1	Rp 22.500,00	Rp 22.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 22.500,00	Rp -
805	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Daun Sop	-	17 Juni 2025	900/1.13.1/103/BLUDSMKN2TPI/2025	0,2	Rp 75.000,00	Rp 15.000,00	17-Jun-25	0,2	Rp 75.000,00	Rp 15.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 75.000,00	Rp -
806	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Bawang Putih /Pck 500gr	-	17 Juni 2025	900/1.13.1/103/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 15.500,00	Rp 15.500,00	17-Jun-25	1	Rp 15.500,00	Rp 15.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 15.500,00	Rp -
807	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Bawang Goreng	-	17 Juni 2025	900/1.13.1/103/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 63.000,00	Rp 63.000,00	17-Jun-25	1	Rp 63.000,00	Rp 63.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 63.000,00	Rp -
808	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Daun Bawang	-	17 Juni 2025	900/1.13.1/103/BLUDSMKN2TPI/2025	0,21	Rp 31.000,00	Rp 6.510,00	17-Jun-25	0,21	Rp 31.000,00	Rp 6.510,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 31.000,00	Rp -
809	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Ayam Filet	-	17 Juni 2025	900/1.13.1/104/BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 43.000,00	Rp 215.000,00	17-Jun-25	5	Rp 43.000,00	Rp 215.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 43.000,00	Rp -
810	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Tepung Cakra Kembar Eko 1kg	Tepung Cakra Kembar Eko 1kg	17 Juni 2025	900/1.13.1/106/BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 142.000,00	Rp 1.420.000,00	17-Jun-25	10	Rp 142.000,00	Rp 1.420.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 142.000,00	Rp -
811	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Tepung Segitiga Biru	Tepung Segitiga Biru	17 Juni 2025	900/1.13.1/106/BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 143.200,00	Rp 716.000,00	17-Jun-25	5	Rp 143.200,00	Rp 716.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 143.200,00	Rp -
812	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Ragi Instan	Tepung Saf Instan 500gr	17 Juni 2025	900/1.13.1/106/BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 60.000,00	Rp 240.000,00	17-Jun-25	4	Rp 60.000,00	Rp 240.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 60.000,00	Rp -
813	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Serai	-	18 Juni 2025	900/1.13.1/117/BLUDSMKN2TPI/2025	0,25	Rp 15.000,00	Rp 3.750,00	18-Jun-25	0,25	Rp 15.000,00	Rp 3.750,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 15.000,00	Rp -
814	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Jahe	-	18 Juni 2025	900/1.13.1/117/BLUDSMKN2TPI/2025	0,25	Rp 40.000,00	Rp 10.000,00	18-Jun-25	0,25	Rp 40.000,00	Rp 10.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 40.000,00	Rp -
815	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Toge	-	18 Juni 2025	900/1.13.1/118/BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 10.000,00	Rp 50.000,00	18-Jun-25	5	Rp 10.000,00	Rp 50.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 10.000,00	Rp -
816	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Santan	-	18 Juni 2025	900/1.13.1/107/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 32.000,00	Rp 32.000,00	18-Jun-25	1	Rp 32.000,00	Rp 32.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 32.000,00	Rp -
817	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Creamer	Nestle Coffeemate 450gr	18 Juni 2025	900/1.13.1/109/BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 37.751,27	Rp 151.005,00	18-Jun-25	4	Rp 37.751,27	Rp 151.005,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 37.751,27	Rp -
818	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Baking Powder	Baking Powder 45g	18 Juni 2025	900/1.13.1/109/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 6.761,42	Rp 6.761,00	18-Jun-25	1	Rp 6.761,42	Rp 6.761,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 6.761,42	Rp -
819	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Gula Aren Bubuk	Ricoman Palm Sugar 400gr	18 Juni 2025	900/1.13.1/109/BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 24.791,88	Rp 123.959,00	18-Jun-25	5	Rp 24.791,88	Rp 123.959,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 24.791,88	Rp -
820	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Susu Cair	UHT Diamond 1000ml	18 Juni 2025	900/1.13.1/109/BLUDSMKN2TPI/2025	7	Rp 222.000,00	Rp 1.554.000,00	18-Jun-25	7	Rp 222.000,00	Rp 1.554.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 222.000,00	Rp -
821	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Biji Kopi	Kopi Kapal Tanker (Biji Kopi)	18 Juni 2025	900/1.13.1/110/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 1.100.000,00	Rp 1.100.000,00	18-Jun-25	1	Rp 1.100.000,00	Rp 1.100.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 1.100.000,00	Rp -
822	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Cokelat Bubuk	Milo Actigen 990	18 Juni 2025	900/1.13.1/110/BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 99.500,00	Rp 497.500,00	18-Jun-25	5	Rp 99.500,00	Rp 497.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 99.500,00	Rp -
823	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Susu Kental Manis	Dairy Champ 480	18 Juni 2025	900/1.13.1/110/BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 13.000,00	Rp 65.000,00	18-Jun-25	5	Rp 13.000,00	Rp 65.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 13.000,00	Rp -
824	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Jus Jeruk	Jungles Juice Orange 1lt	18 Juni 2025	900/1.13.1/110/BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 38.000,00	Rp 152.000,00	18-Jun-25	4	Rp 38.000,00	Rp 152.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 38.000,00	Rp -
825	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Teh Celup 50	Prendjak	18 Juni 2025	900/1.13.1/110/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	18-Jun-25	1	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 10.000,00	Rp -
826	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Jeruk Nipis	-	18 Juni 2025	900/1.13.1/110/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 9.100,00	Rp 9.100,00	18-Jun-25	1	Rp 9.100,00	Rp 9.100,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 9.100,00	Rp -
827	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Jeruk Nipis	-	18 Juni 2025	900/1.13.1/110/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 8.060,00	Rp 8.060,00	18-Jun-25	1	Rp 8.060,00	Rp 8.060,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 8.060,00	Rp -
828	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Jeruk Nipis	-	18 Juni 2025	900/1.13.1/110/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 9.490,00	Rp 9.490,00	18-Jun-25	1	Rp 9.490,00	Rp 9.490,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 9.490,00	Rp -
829	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Tepung Terigu	Tepung Segitiga Biru 1kg	18 Juni 2025	900/1.13.1/110/BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 13.000,00	Rp 39.000,00	18-Jun-25	3	Rp 13.000,00	Rp 39.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 13.000,00	Rp -
830	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Gula Halus	Gula Halus P. Tebu 500gr	18 Juni 2025	900/1.13.1/110/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 12.000,00	Rp 12.000,00	18-Jun-25	1	Rp 12.000,00	Rp 12.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 12.000,00	Rp -
831	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Margarine	Royal Palmia Bks 200	18 Juni 2025	900/1.13.1/110/BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 9.200,00	Rp 46.000,00	18-Jun-25	5	Rp 9.200,00	Rp 46.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 9.200,00	Rp -
832	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Telur Ayam C/10	-	18 Juni 2025	900/1.13.1/110/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 19.000,00	Rp 38.000,00	18-Jun-25	2	Rp 19.000,00	Rp 38.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 19.000,00	Rp -
833	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Sedotan Hygenies	-	18 Juni 2025	900/1.13.1/112/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 34.000,00	Rp 34.000,00	18-Jun-25	1	Rp 34.000,00	Rp 34.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 34.000,00	Rp -
834	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Soda Kue	Kupu Soda Kue	19 Juni 2025	900/1.13.1/119/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 5.300,00	Rp 5.300,00	19-Jun-25	1	Rp 5.300,00	Rp 5.300,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 5.300,00	Rp -
835	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Pasta	Kupu Pasta 60ml Vanilla	19 Juni 2025	900/1.13.1/120/BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 8.500,00	Rp 34.000,00	19-Jun-25	4	Rp 8.500,00	Rp 34.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 8.500,00	Rp -
836	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Margarine	Royal Palmia Butter 200gr	23 Juni 2025	900/1.13.1/126/BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 9.200,00	Rp 46.000,00	23-Jun-25	5	Rp 9.200,00	Rp 46.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 9.200,00	Rp -
837	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Tepung Terigu	Terigu Segitiga Biru 1kg Eko	23 Juni 2025	900/1.13.1/126/BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 12.300,00	Rp 49.200,00	23-Jun-25	4	Rp 12.300,00	Rp 49.200,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 12.300,00	Rp -
838	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Telur Ayam No. 2	-	28 Juli 2025	900/1.13.1/131/BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 55.000,00	Rp 165.000,00	28-Jul-25	3	Rp 55.000,00	Rp 165.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 55.000,00	Rp -
839	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Telur Ayam No. 3/P-150	-	28 Juli 2025	900/1.13.1/131/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 274.000,00	Rp 274.000,00	28-Jul-25	1	Rp 274.000,00	Rp 274.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 274.000,00	Rp -
840	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Meses Cokelat	Meses Valentino Polos 12 kg/pck 1	28 Juli 2025	900/1.13.1/131/BLUDSMKN2TPI/2025

NO	JENIS REKENING		NAMA BARANG	MEREK	PENERIMAAN					PENGELUARAN					SISA		
					Tanggal Terima	No/Tgl.Surat Dasar Penerimaan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Tanggal Keluar	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Peruntukan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2		3	4	5	6	7	8	9 (7x8)	10	11	12	13 (11x12)	14	15	16	17
873	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Selai Cokelat	Dunia BF EKO 5kg (4's)	18 Agustus 2025	900/1.13.1/159/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 165.000,00	Rp 165.000,00	18-Aug-25	1	Rp 165.000,00	Rp 165.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 165.000,00	Rp -
874	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Bakerine Plus 500gr	Bakerine Plus 500gr	18 Agustus 2025	900/1.13.1/159/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 46.000,00	Rp 92.000,00	18-Aug-25	2	Rp 46.000,00	Rp 92.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 46.000,00	Rp -
875	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Saos Sambal	ABC Sambal Asli 950gr	22 Agustus 2025	900/1.13.1/163/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 31.800,00	Rp 31.800,00	22-Aug-25	1	Rp 31.800,00	Rp 31.800,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 31.800,00	Rp -
876	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Santan	-	22 Agustus 2025	900/1.13.1/164/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	22-Aug-25	1	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 30.000,00	Rp -
877	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Tissue Pop Up - 90g/10	Jolly Tissue Pop Up - 90g/10	25 Agustus 2025	900/1.13.1/165/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 28.000,00	Rp 56.000,00	25-Aug-25	2	Rp 28.000,00	Rp 56.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 28.000,00	Rp -
878	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Cokelat Bubuk	Milo Actigen Pouch-790	25 Agustus 2025	900/1.13.1/165/BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 87.300,00	Rp 349.200,00	25-Aug-25	4	Rp 87.300,00	Rp 349.200,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 87.300,00	Rp -
879	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Susu Kental Manis	SKM Bendera Putih Pouch 240	25 Agustus 2025	900/1.13.1/165/BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 10.500,00	Rp 42.000,00	25-Aug-25	4	Rp 10.500,00	Rp 42.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 10.500,00	Rp -
880	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Mentega	Royal Palmia Bks-200	25 Agustus 2025	900/1.13.1/165/BLUDSMKN2TPI/2025	7	Rp 9.200,00	Rp 64.400,00	25-Aug-25	7	Rp 9.200,00	Rp 64.400,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 9.200,00	Rp -
881	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Susu Cair/UHT	Diamond Milk F.Cream-1000/ctn	25 Agustus 2025	900/1.13.1/165/BLUDSMKN2TPI/2025	8	Rp 210.000,00	Rp 1.680.000,00	25-Aug-25	8	Rp 210.000,00	Rp 1.680.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 210.000,00	Rp -
882	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Biji Kopi	Kopi Kapal Tanker	25 Agustus 2025	900/1.13.1/165/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 1.100.000,00	Rp 1.100.000,00	25-Aug-25	1	Rp 1.100.000,00	Rp 1.100.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 1.100.000,00	Rp -
883	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Telur Ayam No. 2 150P	-	25 Agustus 2025	900/1.13.1/170/BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 281.500,00	Rp 844.500,00	25-Aug-25	3	Rp 281.500,00	Rp 844.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 281.500,00	Rp -
884	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Sedotan	Pipet Super Bubble 620 Hitam	25 Agustus 2025	900/1.13.1/166/BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 25.000,00	Rp 75.000,00	25-Aug-25	3	Rp 25.000,00	Rp 75.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 25.000,00	Rp -
885	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Ragi Instan	Tepung Saf Inst Burung Walet 500gr	25 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 60.000,00	Rp 360.000,00	25-Aug-25	6	Rp 60.000,00	Rp 360.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 60.000,00	Rp -
886	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Saos Sambal Asli	Sambal ABC Asli 1000gr	25 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 32.500,00	Rp 97.500,00	25-Aug-25	3	Rp 32.500,00	Rp 97.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 32.500,00	Rp -
887	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Cokelat Bubuk	Win Moten Cokelat Bubuk 165gr	25 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 32.000,00	Rp 192.000,00	25-Aug-25	6	Rp 32.000,00	Rp 192.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 32.000,00	Rp -
888	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Keju Cheddar 2kg	Wincheez	25 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 70.000,00	Rp 420.000,00	25-Aug-25	6	Rp 70.000,00	Rp 420.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 70.000,00	Rp -
889	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Tepung Terigu	Segitiga Biru 1kg	25 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 156.000,00	Rp 156.000,00	25-Aug-25	1	Rp 156.000,00	Rp 156.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 156.000,00	Rp -
890	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Minyak Goreng	Sunco Refl 2lt	25 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 236.300,00	Rp 708.900,00	25-Aug-25	3	Rp 236.300,00	Rp 708.900,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 236.300,00	Rp -
891	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Susu Cair/UHT	Diamond Milk UHT F. Cream 1lt	25 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 207.000,00	Rp 1.242.000,00	25-Aug-25	6	Rp 207.000,00	Rp 1.242.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 207.000,00	Rp -
892	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Tepung Maizena	Maizenaku 500gr	25 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 12.000,00	Rp 24.000,00	25-Aug-25	2	Rp 12.000,00	Rp 24.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 12.000,00	Rp -
893	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kemiri	/Pack 100gr	25 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 8.300,00	Rp 24.900,00	25-Aug-25	3	Rp 8.300,00	Rp 24.900,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 8.300,00	Rp -
894	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kaldu Bubuk/Penyedap Rasa	Totole Kaldu Rasa Jamur 200gr	25 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 26.000,00	Rp 130.000,00	25-Aug-25	5	Rp 26.000,00	Rp 130.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 26.000,00	Rp -
895	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Garam	Dolphin 1kg	25 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 18.000,00	Rp 72.000,00	25-Aug-25	4	Rp 18.000,00	Rp 72.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 18.000,00	Rp -
896	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Penyedap Rasa	Miwon 1Kg	25 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 47.600,00	Rp 47.600,00	25-Aug-25	1	Rp 47.600,00	Rp 47.600,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 47.600,00	Rp -
897	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Pasta Coffee Mocca	Red Bell 30ml KC Coffee Mocca	25 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 15.200,00	Rp 30.400,00	25-Aug-25	2	Rp 15.200,00	Rp 30.400,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 15.200,00	Rp -
898	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Sosis Ayam 360gr	Jofrans Sosis Ayam 360gr	25 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 15.500,00	Rp 77.500,00	25-Aug-25	5	Rp 15.500,00	Rp 77.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 15.500,00	Rp -
899	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Susu Bubuk /Pack 250gr	-	25 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 11.500,00	Rp 115.000,00	25-Aug-25	10	Rp 11.500,00	Rp 115.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 11.500,00	Rp -
900	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Merica/Bumbu Masak (Serbuk)	Ladaku Merica Bubuk SCH 3gr	25 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 10.500,00	Rp 21.000,00	25-Aug-25	2	Rp 10.500,00	Rp 21.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 10.500,00	Rp -
901	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Ketan	Ketan Putih	25 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	20	Rp 8.300,00	Rp 166.000,00	25-Aug-25	20	Rp 8.300,00	Rp 166.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 8.300,00	Rp -
902	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Ragi	Tepung Saf Inst Burung Walet 500gr	25 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 12.200,00	Rp 61.000,00	25-Aug-25	5	Rp 12.200,00	Rp 61.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 12.200,00	Rp -
903	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Ragi	Tepung Saf Inst Burung Walet 500gr	25 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 59.500,00	Rp 178.500,00	25-Aug-25	3	Rp 59.500,00	Rp 178.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 59.500,00	Rp -
904	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Ragi	Tepung Saf Inst Burung Walet 500gr	25 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 56.000,00	Rp 168.000,00	25-Aug-25	3	Rp 56.000,00	Rp 168.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 56.000,00	Rp -
905	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Agar2 Powder/Bubuk	Nutrijell	27 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 57.500,00	Rp 172.500,00	27-Aug-25	3	Rp 57.500,00	Rp 172.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 57.500,00	Rp -
906	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Agar2 Powder/Bubuk	Nutrijell	27 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 57.500,00	Rp 172.500,00	27-Aug-25	3	Rp 57.500,00	Rp 172.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 57.500,00	Rp -
907	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Agar2 Powder/Bubuk	Nutrijell	27 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 63.500,00	Rp 127.000,00	27-Aug-25	2	Rp 63.500,00	Rp 127.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 63.500,00	Rp -
908	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Agar2 Powder/Bubuk	Nutrijell	27 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 63.500,00	Rp 127.000,00	27-Aug-25	2	Rp 63.500,00	Rp 127.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 63.500,00	Rp -
909	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Agar2 Powder/Bubuk	Nutrijell	27 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 63.500,00	Rp 127.000,00	27-Aug-25	2	Rp 63.500,00	Rp 127.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 63.500,00	Rp -
910	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Agar2 Powder/Bubuk	Nutrijell	27 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 63.500,00	Rp 127.000,00	27-Aug-25	2	Rp 63.500,00	Rp 127.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 63.500,00	Rp -
911	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Agar2 Powder/Bubuk	Nutrijell	27 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 63.500,00	Rp 127.000,00	27-Aug-25	2	Rp 63.500,00	Rp 127.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 63.500,00	Rp -
912	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Agar2 Powder/Bubuk	Nutrijell	27 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 63.500,00	Rp 127.000,00	27-Aug-25	2	Rp 63.500,00	Rp 127.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 63.500,00	Rp -
913	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Agar2 Powder/Bubuk	Nutrijell	27 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 63.500,00	Rp 127.000,00	27-Aug-25	2	Rp 63.500,00	Rp 127.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 63.500,00	Rp -
914	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Mayoinase	Maestro Pouch 1kg/Dus	27 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 299.500,00	Rp 299.500,00	27-Aug-25	1	Rp 299.500,00	Rp 299.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 299.500,00	Rp -
915	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Mayoinase	Maestro Pouch 1kg	27 Agustus 2025	900/1.13.1/168/BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 30.900,00	Rp 154.500,00	27-Aug-25	5	Rp 30.900,00	Rp 154.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 30.900,00	Rp -
916	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Santan	Santan	27 Agustus 2025	900/1.13.1/176/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 30.000,00	Rp 60.000,00	27-Aug-25	2	Rp 30.000,00	Rp 60.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 30.000,00	Rp -
917	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Selai Cokelat	Dunia Filling CB 4x5 Kg	27 Agustus 2025	900/1.13.1/177/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 488.000,00	Rp 488.000,00	27-Aug-25	1	Rp 488.000,00	Rp 488.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 488.000,00	Rp -
918	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Chocolate Powder 1 Kg	Chocolate Powder	26 Agustus 2025	900/1.13.1/174/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	26-Aug-25	1	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 150.000,00	Rp -
919	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Syrup Butterschoth	Syrup Butterschoth	26 Agustus 2025	900/1.13.1/174/BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 130.000,00	Rp 390.000,00	26-Aug-25	3	Rp 130.000,00	Rp 390.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 130.000,00	Rp -
920	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Pembalut Biasa	Softex Daun Sirih	27 Agustus 2025	900/1.13.1/178/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 13.500,00	Rp 27.000,00	27-Aug-25	2	Rp 13.500,00	Rp 27.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 13.500,00	Rp -
921	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Pembalut Panjang	Softex Daun Sirih	27 Agustus 2025	900/1.13.1/178/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 22.000,00	Rp 22.000,00	27-Aug-25	1	Rp 22.000,00	Rp 22.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 22.000,00	Rp -
922	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Krim Kocok	Shine Road Whipping Cream	28 Agustus 2025	900/1.13.1/181/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 580.000,00	Rp 1.160.000,00	28-Aug-25	2	Rp 580.000,00	Rp 1.160.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 580.000,00	Rp -
923	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Jagung Kemasan/Kernel Corn	Mili Kernel Corn	28 Agustus 2025	900/1.13.1/181/BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 15.500,00	Rp 77.500,00	28-Aug-25	5	Rp 15.500,00	Rp 77.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 15.500,00	Rp -
924	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Bawang Putih	-	28 Agustus 2025	900/1.13.1/181/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 15.500,00	Rp 31.000,00	28-Aug-25	2	Rp 15.500,00	Rp 31.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 15.500,00	Rp -
925	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Bawang Merah	-	28 Agustus 2025	900/1.13.1/181/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 11.000,00	Rp 22.000,00	28-Aug-25	2	Rp 11.000,00	Rp 22.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 11.000,00	Rp -
926	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Lada Bubuk	Lada Hitam /pck 50gr	28 Agustus 2025	900/1.13.1/181/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 8.800,00	Rp 8.800,00	28-Aug-25	1	Rp 8.800,00	Rp 8.800,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 8.800,00	Rp -
927	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Biji Merica	Biji Merica /pck 500gr	28 Agustus 2025	900/1.13.1/181/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 102.000,00	Rp 102.000,00	28-Aug-25	1	Rp 102.000,00	Rp 102.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 102.000,00	Rp -
928	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Ikan/Daging	Frs Ikan/Daging	28 Agustus 2025	900/1.13.1/181/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 28.200,00	Rp 56.400,00	28-Aug-25	2	Rp 28.200,00	Rp 56.400,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 28.200,00	Rp -
929	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Abon Ayam Pedas	Abon Ayam Pedas 1kg	28 Agustus 2025	900/1.13.1/181/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 184.500,00	Rp 184.500,00	28-Aug-25	1	Rp 184.500,00	Rp 184.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 184.500,00	Rp -
930	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Ayam Potong	-	29 Agustus 2025	900/1.13.1/182/BLUDSMKN2TPI/2025	5,6	Rp 35.000,00	Rp 196.000,00	29-Aug-25	5,6	Rp 35.000,00	Rp 196.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 35.000,00	Rp -
931	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Tepung Terigu	Tepung Cakra Ekonomi - 1000/ctn	31 Agustus 2025	900/1.13.1/184/BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 156.000,00	Rp 624.000,00	31-Aug-25	4	Rp 156.000,00	Rp 624.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 156.000,00	Rp -
932	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Tepung Terigu	Tepung Segitiga Biru - 1000/ds	31 Agustus 2025	900/1.13.1/184/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 162.000,00	Rp 162.000,00	31-Aug-25	1	Rp 162.000,00	Rp 162.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 162.000,00	Rp -
933	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Tepung Terigu	Tepung Segitiga Biru Eko 1kg	05 September 2025	900/1.13.1/189/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 12.200,00	Rp 12.200,00	05-Sep-25	1	Rp 12.200,00	Rp 12.200,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 12.200,00	Rp -
934	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Susu Cair/UHT	UHT Fullcream 1lt Diamond Milk	05 September 2025	900/1.13.1/189/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 17.500,00	Rp 35.000,00	05-Sep-25	2	Rp 17.500,00	Rp 35.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 17.500,00	Rp -
935	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Keju Cheddar	Keju Cheddar Wincheez 2kg	05 September 2025	900/1.13.1/189/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 70.000,00	Rp 70.000,00	05-Sep-25	1	Rp 70.000,00	Rp 70.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 70.000,00	Rp -
936	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Merica Bubuk SCH	Merica Bubuk SCH Ladaku 3gr	05 September 2025	900/1.13.1/189/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 10.500,00	Rp 21.000,00	05-Sep-25	2	Rp 10.500,00	Rp 21.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 10.500,00	Rp -
937	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Saos Sambal	Sambal ABC 1000gr	05 September 2025	900/1.13.1/189/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 32.500,00	Rp 65.000,00	05-Sep-25	2	Rp 32.500,00	Rp 65.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 32.500,00	Rp -
938	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Saus Tomat	Saus Tomat ABC 1000gr	05 September 2025	900/1.13.1/189/BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 20.900,00	Rp 83.600,00	05-Sep-25	4	Rp 20.900,00	Rp 83.600,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 20.900,00	Rp -
939	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Mentega	Mentega Blue Band 1kg	05 September 2025	900/1.13.1/189/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 38.000,00	Rp 38.000,00	05-Sep-25	1	Rp 38.000,00	Rp 38.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 38.000,00	Rp -
940	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Bawang Goreng	Bawang Goreng /Pack 50	05 September 2025	900/1.13.1/189/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 45.000,00	Rp 45.000,00	05-Sep-25	1	Rp 45.000,00	Rp 45.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 45.000,00	Rp -
941	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Kecap Manis	Kecap Manis ABC Ref 600ml	05 September 2025	900/1.13.1/189/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 20.000,00	Rp 40.000,00	05-Sep-25	2	Rp 20.000,00	Rp 40.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 20.000,00	Rp -
942	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Kecap Asin	Kecap Asin ABC 135ml	05 September 2025	900/1.13.1/189/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 5.600,00	Rp 11.200,00	05-Sep-25	2	Rp 5.600,00	Rp 11.200,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 5.600,00	Rp -
943	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Garam Meja	Garam Meja Dolphin 1kg	05 September 2025	900/1.13.1/189/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 18.000,00	Rp 36.000,00	05-Sep-25	2	Rp 18.000,00	Rp 36.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 18.000,00	Rp -
944	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Bihun	Bihun Segitiga Rantai	05 September 2025	900/1.13.1/189/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 110.000,00	Rp 110.000,00	05-Sep-25	1	Rp 110.000,00	Rp 110.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 110.000,00	Rp -
945	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Gula Merah	-	07 September 2025	900/1.13.1/191/BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 13.800,00	Rp 41.400,00	07-Sep-25	3	Rp 13.800,00	Rp 41.400,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 13.800,00	Rp -
946	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Tepung Terigu	Tepung Cakra Ekonomi 1000-ctn	07 September 2025	900/1.13.1/191/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 156.000,00	Rp 312.000,00	07-Sep-25	2	Rp 156.000,00	Rp 312.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 156.000,00	Rp -
947	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Kornet	Pronas CB 120gr	07 September 2025	900/1.13.1/192/BLUDSMKN2TPI/2025	18	Rp 17.290,00	Rp 311.220,00	07-Sep-25	18	Rp 17.290,00	Rp 311.220,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 17.290,00	Rp -
948	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Pasta Tomat	Pasta Tomat - 430 Ayam Brand	07 September 2025	900/1.13.1/193/BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 30.000,00	Rp 90.000,00	07-Sep-25	3	Rp 30.000,00	Rp 90.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 30.000,00	Rp -
949	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Gula Merah	-	07 September 2025	900/1.13.1/193/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 13.800,00	Rp 27.600,00	07-Sep-25	2	Rp 13.800,00	Rp 27.600,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 13.800,00	Rp -
950	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Daging Sapi	-	09 September 2025	900/1.13.1/197/BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 125.000,00	Rp 500.000,00	09-Sep-25	4	Rp 125.000,00	Rp 500.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 125.000,00	Rp -
951	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Sayuran - Toge	-	08 September 2025	900/1.13.1/194/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	08-Sep-25	1	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 10.000,00	Rp -
952	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Bawang Putih	-	08 September 2025	900/1.13.1/194/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 36.000,00	Rp 72.000,00	08-Sep-25	2	Rp 36.000,00	Rp 72.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop	0	Rp 36.000,00	Rp -
953	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Daun Bawang	-	08 September 2025	900/1.13.1/194/BLUDSMKN2TPI/2025	0,5

NO	JENIS REKENING		NAMA BARANG	MEREK	PENERIMAAN					PENGELUARAN						SISA		
					Tanggal Terima	No/Tgl.Surat Dasar Penerimaan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Tanggal Keluar	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Peruntukan		Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2		3	4	5	6	7	8	9 (7x8)	10	11	12	13 (11x12)	14		15	16	17
989	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Keju Cheddar	Wincheez Keju C heddar 250 gx8/Bo	24 September 2025	900/1.13.1/213/BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 376.500,00	Rp 1.506.000,00	24-Sep-25	4	Rp 376.500,00	Rp 1.506.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 376.500,00	Rp -
990	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Tepung Terigu	Tepung Cakra Kembar Ekonomi 1 ki	24 September 2025	900/1.13.1/213/BLUDSMKN2TPI/2025	20	Rp 142.000,00	Rp 2.840.000,00	24-Sep-25	20	Rp 142.000,00	Rp 2.840.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 142.000,00	Rp -
991	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Tepung Terigu	Tepung Segitiga Biru Eko 1 Kg	24 September 2025	900/1.13.1/213/BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 143.200,00	Rp 1.432.000,00	24-Sep-25	10	Rp 143.200,00	Rp 1.432.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 143.200,00	Rp -
992	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Sosis Ayam	Jofran Sosis Ayam 360 gr	24 September 2025	900/1.13.1/213/BLUDSMKN2TPI/2025	30	Rp 16.800,00	Rp 504.000,00	24-Sep-25	30	Rp 16.800,00	Rp 504.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 16.800,00	Rp -
993	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Susu Cair/UHT	Diamond Milk UHT F, Cream 1Ltr	24 September 2025	900/1.13.1/213/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 207.000,00	Rp 207.000,00	24-Sep-25	1	Rp 207.000,00	Rp 207.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 207.000,00	Rp -
994	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Garam	Garam Anak Terbang HLS 500 gr	24 September 2025	900/1.13.1/213/BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 4.900,00	Rp 19.600,00	24-Sep-25	4	Rp 4.900,00	Rp 19.600,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 4.900,00	Rp -
995	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Gula Merah		24 September 2025	900/1.13.1/213/BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 14.500,00	Rp 145.000,00	24-Sep-25	10	Rp 14.500,00	Rp 145.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 14.500,00	Rp -
996	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Meses	Meses Valentino Polos 12 kg /pcs 1 k	24 September 2025	900/1.13.1/213/BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 23.500,00	Rp 94.000,00	24-Sep-25	4	Rp 23.500,00	Rp 94.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 23.500,00	Rp -
997	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Kopi Sachet	Nescafe Classic 2 gx60's/Bal	24 September 2025	900/1.13.1/213/BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 75.000,00	Rp 750.000,00	24-Sep-25	10	Rp 75.000,00	Rp 750.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 75.000,00	Rp -
998	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Ragi	Tepung Saf Inst Brg Walet 500 gr	24 September 2025	900/1.13.1/213/BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 57.000,00	Rp 570.000,00	24-Sep-25	10	Rp 57.000,00	Rp 570.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 57.000,00	Rp -
999	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Tepung	Crunchy Tepung Roti Mix 10 Kg/Pck 1	24 September 2025	900/1.13.1/213/BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 7.500,00	Rp 30.000,00	24-Sep-25	4	Rp 7.500,00	Rp 30.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 7.500,00	Rp -
1000	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Bakarine Plus 500 gr	Bakarine Plus 500 gr	24 September 2025	900/1.13.1/213/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 55.000,00	Rp 110.000,00	24-Sep-25	2	Rp 55.000,00	Rp 110.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 55.000,00	Rp -
1001	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Saos Sambal SCH	Sambal ABC Asli SCh 21's/Pck	24 September 2025	900/1.13.1/213/BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 8.100,00	Rp 48.600,00	24-Sep-25	6	Rp 8.100,00	Rp 48.600,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 8.100,00	Rp -
1002	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Kecap Manis	Kecap ABC Manis Ref 825 ml	24 September 2025	900/1.13.1/213/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 26.000,00	Rp 52.000,00	24-Sep-25	2	Rp 26.000,00	Rp 52.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 26.000,00	Rp -
1003	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Kecap Manis Extra Pedas	Kecap ABC Manis Extra Pds 950 gr	24 September 2025	900/1.13.1/213/BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 30.500,00	Rp 122.000,00	24-Sep-25	4	Rp 30.500,00	Rp 122.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 30.500,00	Rp -
1004	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Pasta	Kp Pasta 60 ml Mocca	24 September 2025	900/1.13.1/213/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 47.500,00	Rp 47.500,00	24-Sep-25	1	Rp 47.500,00	Rp 47.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 47.500,00	Rp -
1005	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Pasta Mocca	Red Bell 30 ml Kc Coffee Mocca	24 September 2025	900/1.13.1/213/BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 15.200,00	Rp 91.200,00	24-Sep-25	6	Rp 15.200,00	Rp 91.200,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 15.200,00	Rp -
1006	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Syrup Butterschoth		24 September 2025	900/1.13.1/215/BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 146.497,00	Rp 439.491,00	24-Sep-25	3	Rp 146.497,00	Rp 439.491,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 146.497,00	Rp -
1007	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Teh Celup	Prendjak	25 September 2025	900/1.13.1/216/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 19.900,00	Rp 19.900,00	25-Sep-25	1	Rp 19.900,00	Rp 19.900,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 19.900,00	Rp -
1008	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Pasta Vaneli	Kupu Kupu Pasta Vaneli 60ml	25 September 2025	900/1.13.1/216/BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 8.400,00	Rp 42.000,00	25-Sep-25	5	Rp 8.400,00	Rp 42.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 8.400,00	Rp -
1009	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Kopi Robusta Gayo	Kopi Robusta Gayo	26 September 2025	900/1.13.1/219/BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 145.000,00	Rp 870.000,00	26-Sep-25	6	Rp 145.000,00	Rp 870.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 145.000,00	Rp -
1010	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	AYAM POTONG	AYAM POTONG	07 Oktober 2025	900/1.3.3/227/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	9,5	Rp 33.000,00	Rp 313.500,00	07-Oct-25	9,5	Rp 33.000,00	Rp 313.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 33.000,00	Rp -
1011	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	WORTEL	WORTEL	07 Oktober 2025	900/1.3.3/228/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2,1	Rp 15.000,00	Rp 31.500,00	07-Oct-25	2,1	Rp 15.000,00	Rp 31.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 15.000,00	Rp -
1012	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	CABE MERAH	CABE MERAH	07 Oktober 2025	900/1.3.3/228/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1,01	Rp 83.830,00	Rp 83.830,00	07-Oct-25	1,01	Rp 83.000,00	Rp 83.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 83.000,00	Rp -
1013	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	TOMAT BUAH	TOMAT BUAH	07 Oktober 2025	900/1.3.3/228/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1,98	Rp 19.000,00	Rp 37.620,00	07-Oct-25	1,98	Rp 19.000,00	Rp 37.620,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 19.000,00	Rp -
1014	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	GULA MERAH DUA JARI PCK 50	GULA MERAH DUA JARI PCK 500 gr	07 Oktober 2025	900/1.3.3/228/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 13.000,00	Rp 26.000,00	07-Oct-25	2	Rp 13.000,00	Rp 26.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 13.000,00	Rp -
1015	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	BUMBU MASAK	BUMBU MASAK	07 Oktober 2025	900/1.3.3/228/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 6.000,00	Rp 60.000,00	07-Oct-25	10	Rp 6.000,00	Rp 60.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 6.000,00	Rp -
1016	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	BAWANG PUTIH/ PCS 500 gr	BAWANG PUTIH/ PCS 500 gr	07 Oktober 2025	900/1.3.3/228/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 15.200,00	Rp 60.800,00	07-Oct-25	4	Rp 15.200,00	Rp 60.800,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 15.200,00	Rp -
1017	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	TOGE 1/4 KG	TOGE 1/4 KG	07 Oktober 2025	900/1.3.3/228/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 2.500,00	Rp 10.000,00	07-Oct-25	4	Rp 2.500,00	Rp 10.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 2.500,00	Rp -
1018	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	BAWANG MERAH INDIA/PCS 5	BAWANG MERAH INDIA/PCS 500gr	07 Oktober 2025	900/1.3.3/228/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	8	Rp 9.200,00	Rp 73.600,00	07-Oct-25	8	Rp 9.200,00	Rp 73.600,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 9.200,00	Rp -
1019	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	KETUMBAR/PCS 250 gr	KETUMBAR/PCS 250 gr	07 Oktober 2025	900/1.3.3/228/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	07-Oct-25	1	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 10.000,00	Rp -
1020	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	KOPI KAPAL TANKER 320 gr KS	KOPI KAPAL TANKER 320 gr KSR	07 Oktober 2025	900/1.3.3/228/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 28.700,00	Rp 28.700,00	07-Oct-25	1	Rp 28.700,00	Rp 28.700,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 28.700,00	Rp -
1021	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	BUMBU MASAK	BUMBU MASAK	07 Oktober 2025	900/1.3.3/228/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00	07-Oct-25	1	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 100.000,00	Rp -
1022	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	ABC TERASI UDANG 4,2 gr x 20	ABC TERASI UDANG 4,2 gr x 20 /BKS	07 Oktober 2025	900/1.3.3/228/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 7.800,00	Rp 15.600,00	07-Oct-25	2	Rp 7.800,00	Rp 15.600,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 7.800,00	Rp -
1023	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	pinang	pinang	07 Oktober 2025	900/1.3.3/228/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 10.500,00	Rp 10.500,00	07-Oct-25	1	Rp 10.500,00	Rp 10.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 10.500,00	Rp -
1024	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	PISANG BERANGAN	PISANG BERANGAN	08 Oktober 2025	900/1.3.3/235/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2,426	Rp 16.000,00	Rp 38.816,00	08-Oct-25	2,426	Rp 16.000,00	Rp 38.816,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 16.000,00	Rp -
1025	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	TISSUE MEJA	TISSUE MEJA	08 Oktober 2025	900/1.3.3/236/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 8.500,00	Rp 17.000,00	08-Oct-25	2	Rp 8.500,00	Rp 17.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 8.500,00	Rp -
1026	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Ikan Selar	Ikan Selar	08 Oktober 2025	900/1.3.3/237/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 42.000,00	Rp 84.000,00	08-Oct-25	2	Rp 42.000,00	Rp 84.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 42.000,00	Rp -
1027	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Kecap Manis	Kecap Manis	08 Oktober 2025	900/1.3.3/231/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00	08-Oct-25	1	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 20.000,00	Rp -
1028	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	Kelapa	Kelapa	08 Oktober 2025	900/1.3.3/232/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 30.000,00	Rp 90.000,00	08-Oct-25	3	Rp 30.000,00	Rp 90.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 30.000,00	Rp -
1029	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	KENCUR	KENCUR	08 Oktober 2025	900/1.3.3/233/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,05	Rp 60.000,00	Rp 3.000,00	08-Oct-25	0,05	Rp 60.000,00	Rp 3.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 60.000,00	Rp -
1030	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	TELOR AYAM NO 28 4'S	TELOR AYAM NO 28 4'S	08 Oktober 2025	900/1.3.3/233/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 9.000,00	Rp 9.000,00	08-Oct-25	1	Rp 9.000,00	Rp 9.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 9.000,00	Rp -
1031	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	ROYCO FDS 230g AYAM	ROYCO FDS 230g AYAM	08 Oktober 2025	900/1.3.3/233/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	08-Oct-25	1	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 10.000,00	Rp -
1032	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	KENTANG BUKIT TINGGI	KENTANG BUKIT TINGGI	08 Oktober 2025	900/1.3.3/233/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 22.000,00	Rp 66.000,00	08-Oct-25	3	Rp 22.000,00	Rp 66.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 22.000,00	Rp -
1033	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	TEMPE	TEMPE	08 Oktober 2025	900/1.3.3/233/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 4.000,00	Rp 12.000,00	08-Oct-25	3	Rp 4.000,00	Rp 12.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 4.000,00	Rp -
1034	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	TEMPE POTONG AYU	TEMPE POTONG AYU	08 Oktober 2025	900/1.3.3/233/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 4.000,00	Rp 4.000,00	08-Oct-25	1	Rp 4.000,00	Rp 4.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 4.000,00	Rp -
1035	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	ADABI 200g PASTA ASAM JAWA	ADABI 200g PASTA ASAM JAWA	08 Oktober 2025	900/1.3.3/233/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00	08-Oct-25	1	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 15.000,00	Rp -
1036	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	DAUN UBI	DAUN UBI	09 Oktober 2025	900/1.3.3/239/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 5.030,00	Rp 5.030,00	09-Oct-25	1	Rp 5.030,00	Rp 5.030,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 5.030,00	Rp -
1037	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	SEMANGKA BULAT	SEMANGKA BULAT	09 Oktober 2025	900/1.3.3/239/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 44.070,00	Rp 44.070,00	09-Oct-25	1	Rp 44.070,00	Rp 44.070,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 44.070,00	Rp -
1038	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	AYAM POTONG	AYAM POTONG	09 Oktober 2025	900/1.3.3/240/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 34.000,00	Rp 102.000,00	09-Oct-25	3	Rp 34.000,00	Rp 102.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 34.000,00	Rp -
1039	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	TOGE	TOGE	09 Oktober 2025	900/1.3.3/238/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,5	Rp 10.000,00	Rp 5.000,00	09-Oct-25	0,5	Rp 10.000,00	Rp 5.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 10.000,00	Rp -
1040	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	SAYUR KOL UTUH	SAYUR KOL UTUH	09 Oktober 2025	900/1.3.3/238/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1,15	Rp 13.000,00	Rp 14.950,00	09-Oct-25	1,15	Rp 13.000,00	Rp 14.950,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 13.000,00	Rp -
1041	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	KACANG PANJANG	KACANG PANJANG	09 Oktober 2025	900/1.3.3/238/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,5	Rp 15.000,00	Rp 7.500,00	09-Oct-25	0,5	Rp 15.000,00	Rp 7.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 15.000,00	Rp -
1042	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	JERUK MEDAN	JERUK MEDAN	09 Oktober 2025	900/1.3.3/241/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	6,185	Rp 23.000,00	Rp 142.255,00	09-Oct-25	6,185	Rp 23.000,00	Rp 142.255,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 23.000,00	Rp -
1043	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	CABE HIJAU	CABE HIJAU	09 Oktober 2025	900/1.3.3/241/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 53.000,00	Rp 53.000,00	09-Oct-25	1	Rp 53.000,00	Rp 53.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 53.000,00	Rp -
1044	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	FRS. IKAN /DAGING	FRS. IKAN /DAGING	09 Oktober 2025	900/1.3.3/241/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 11.200,00	Rp 44.800,00	09-Oct-25	4	Rp 11.200,00	Rp 44.800,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 11.200,00	Rp -
1045	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	SAWI BOLA	SAWI BOLA	09 Oktober 2025	900/1.3.3/241/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	09-Oct-25	1	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 30.000,00	Rp -
1046	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	KERUPUK UDANG ORANGE 50	KERUPUK UDANG ORANGE 500 gr	09 Oktober 2025	900/1.3.3/241/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 14.500,00	Rp 14.500,00	09-Oct-25	1	Rp 14.500,00	Rp 14.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 14.500,00	Rp -
1047	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	BUNCIS	BUNCIS	09 Oktober 2025	900/1.3.3/241/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 21.105,00	Rp 21.105,00	09-Oct-25	1	Rp 21.105,00	Rp 21.105,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 21.105,00	Rp -
1048	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	ADABI KARI AYAM DAGING 24 G	ADABI KARI AYAM DAGING 24 GR	10 Oktober 2025	900/1.3.3/248/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 3.000,00	Rp 3.000,00	10-Oct-25	1	Rp 3.000,00	Rp 3.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 3.000,00	Rp -
1049	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	SANTAN	SANTAN	10 Oktober 2025	900/1.3.3/247/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 30.000,00	Rp 150.000,00	10-Oct-25	5	Rp 30.000,00	Rp 150.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 30.000,00	Rp -
1050	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	TOMAT SAYUR	TOMAT SAYUR	10 Oktober 2025	900/1.3.3/245/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,728	Rp 23.000,00	Rp 16.744,00	10-Oct-25	0,728	Rp 23.000,00	Rp 16.744,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 23.000,00	Rp -
1051	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	CABE MERAH	CABE MERAH	10 Oktober 2025	900/1.3.3/245/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 91.000,00	Rp 91.000,00	10-Oct-25	1	Rp 91.000,00	Rp 91.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 91.000,00	Rp -
1052	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	TIMUN	TIMUN	10 Oktober 2025	900/1.3.3/245/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2,12	Rp 15.000,00	Rp 31.800,00	10-Oct-25	2,12	Rp 15.000,00	Rp 31.800,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 15.000,00	Rp -
1053	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	MINYAK SUNCO REF 1 LTR	MINYAK SUNCO REF 1 LTR	10 Oktober 2025	900/1.3.3/245/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 1.000,00	Rp 1.000,00	10-Oct-25	1	Rp 1.000,00	Rp 1.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 1.000,00	Rp -
1054	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	KENTANG	KENTANG	10 Oktober 2025	900/1.3.3/245/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1,95	Rp 21.000,00	Rp 40.950,00	10-Oct-25	1,95	Rp 21.000,00	Rp 40.950,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 21.000,00	Rp -
1055	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	JERUK SAMBAL	JERUK SAMBAL	10 Oktober 2025	900/1.3.3/244/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,15	Rp 20.000,00	Rp 3.000,00	10-Oct-25	0,15	Rp 20.000,00	Rp 3.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 20.000,00	Rp -
1056	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	DAUN JERUK	DAUN JERUK	10 Oktober 2025	900/1.3.3/244/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 2.000,00	Rp 2.000,00	10-Oct-25	1	Rp 2.000,00	Rp 2.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 2.000,00	Rp -
1057	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	KEMIRI UKURAN KECIL	KEMIRI UKURAN KECIL	10 Oktober 2025	900/1.3.3/244/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 7.000,00	Rp 7.000,00	10-Oct-25	1	Rp 7.000,00	Rp 7.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 7.000,00	Rp -
1058	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	JAHE	JAHE	10 Oktober 2025	900/1.3.3/244/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,25	Rp 30.000,00	Rp 7.500,00	10-Oct-25	0,25	Rp 30.000,00	Rp 7.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 30.000,00	Rp -
1059	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	LENGKUAS	LENGKUAS	10 Oktober 2025	900/1.3.3/244/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,25	Rp 20.000,00	Rp 5.000,00	10-Oct-25	0,25	Rp 20.000,00	Rp 5.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 20.000,00	Rp -
1060	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	SOP BUNTUT 8 GR	SOP BUNTUT 8 GR	10 Oktober 2025	900/1.3.3/244/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 3.500,00	Rp 14.000,00	10-Oct-25	4	Rp 3.500,00	Rp 14.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 3.500,00	Rp -
1061	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	KUNYIT	KUNYIT	10 Oktober 2025	900/1.3.3/244/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,1	Rp 20.000,00	Rp 2.000,00	10-Oct-25	0,1	Rp 20.000,00	Rp 2.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 20.000,00	Rp -
1062	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	SERAI	SERAI	10 Oktober 2025	900/1.3.3/244/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,18	Rp 15.000,00	Rp 2.700,00	10-Oct-25	0,18	Rp 15.000,00	Rp 2.700,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 15.000,00	Rp -
1063	0045	Belanja Natura dan Pakan - Natura dan Pakan Lainnya	SELADA HIDROPONIK	SELADA HIDROPONIK	11 Oktober 2025	900/1.3.3/252/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 33.030,00	Rp 33.030,00	11-Oct-25	1	Rp 33.030,00	Rp 33.030,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0

NO		JENIS REKENING	NAMA BARANG	MEREK	PENERIMAAN					PENGELUARAN						SISA		
					Tanggal Terima	No/Tgl.Surat Dasar Penerimaan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Tanggal Keluar	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Peruntukan		Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2		3	4	5	6	7	8	9 (7x8)	10	11	12	13 (11x12)	14		15	16	17
1105	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Amazing Diswash JRG-4000ml	Amazing Diswash JRG-4000ml	04 November 2025	900/1.3.3/269/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 70.500,00	Rp 70.500,00	04-Nov-25	1	Rp 70.500,00	Rp 70.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 70.500,00	Rp -
1106	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Daging Cincang	Daging Cincang	05 November 2025	900/1.3.3/273/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1,5	Rp 100.000,00	Rp 150.000,00	05-Nov-25	1,5	Rp 100.000,00	Rp 150.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 100.000,00	Rp -
1107	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Golden Choco Chruncy 1kg	Golden Choco Chruncy 1kg	05 November 2025	900/1.3.3/270/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 53.000,00	Rp 159.000,00	05-Nov-25	3	Rp 53.000,00	Rp 159.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 53.000,00	Rp -
1108	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Goldenfill Choco Crunchy 1 kg	Goldenfill Choco Crunchy 1 kg	18 November 2025	900/1.3.3/275/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 53.000,00	Rp 53.000,00	18-Nov-25	1	Rp 53.000,00	Rp 53.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 53.000,00	Rp -
1109	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Ricoman Palm Sugar 400 gr	Ricoman Palm Sugar 400 gr	18 November 2025	900/1.3.3/275/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 22.000,00	Rp 220.000,00	18-Nov-25	10	Rp 22.000,00	Rp 220.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 22.000,00	Rp -
1110	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Gula Pasir 1 kg	Gula Pasir 1 kg	18 November 2025	900/1.3.3/275/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 14.000,00	Rp 140.000,00	18-Nov-25	10	Rp 14.000,00	Rp 140.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 14.000,00	Rp -
1111	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kunci Biru Premiun 1 kg (Tepung	Kunci Biru Premiun 1 kg (Tepung Terig	18 November 2025	900/1.3.3/275/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 12.500,00	Rp 62.500,00	18-Nov-25	5	Rp 12.500,00	Rp 62.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 12.500,00	Rp -
1112	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Toples 2GB Natha 12x300 Gr	Toples 2GB Natha 12x300 Gr	18 November 2025	900/1.3.3/276/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 6.000,00	Rp 60.000,00	18-Nov-25	10	Rp 6.000,00	Rp 60.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 6.000,00	Rp -
1113	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Keju Cheddar Wincheez 2 kg	Keju Cheddar Wincheez 2 kg	18 November 2025	900/1.3.3/277/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 70.000,00	Rp 210.000,00	18-Nov-25	3	Rp 70.000,00	Rp 210.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 70.000,00	Rp -
1114	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	KP. SP 1 kg	KP. SP 1 kg	18 November 2025	900/1.3.3/277/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 67.000,00	Rp 67.000,00	18-Nov-25	1	Rp 67.000,00	Rp 67.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 67.000,00	Rp -
1115	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Keju Cheddar Wincheez 250 gr	Keju Cheddar Wincheez 250 gr	18 November 2025	900/1.3.3/277/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 95.000,00	Rp 95.000,00	18-Nov-25	1	Rp 95.000,00	Rp 95.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 95.000,00	Rp -
1116	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	KP. Pasta 60 ml PANDAN	KP. Pasta 60 ml PANDAN	19 November 2025	900/1.3.3/278/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 8.100,00	Rp 32.400,00	19-Nov-25	4	Rp 8.100,00	Rp 32.400,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 8.100,00	Rp -
1117	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	KP. Pasta 60 ml COKLAT	KP. Pasta 60 ml COKLAT	19 November 2025	900/1.3.3/278/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 8.100,00	Rp 16.200,00	19-Nov-25	2	Rp 8.100,00	Rp 16.200,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 8.100,00	Rp -
1118	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Whincheez Keju Cheddar 2 kg	Whincheez Keju Cheddar 2 kg	19 November 2025	900/1.3.3/278/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 70.000,00	Rp 210.000,00	19-Nov-25	3	Rp 70.000,00	Rp 210.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 70.000,00	Rp -
1119	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Meses Rimbo Coklat 12 kg/P.1K	Meses Rimbo Coklat 12 kg/P.1kg	19 November 2025	900/1.3.3/278/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 31.000,00	Rp 93.000,00	19-Nov-25	3	Rp 31.000,00	Rp 93.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 31.000,00	Rp -
1120	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Meses ASW Coklat /P.1 kg	Meses ASW Coklat /P.1 kg	19 November 2025	900/1.3.3/278/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 26.500,00	Rp 79.500,00	19-Nov-25	3	Rp 26.500,00	Rp 79.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 26.500,00	Rp -
1121	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	SKM Daily Charm Pillow 2,5 kg	SKM Daily Charm Pillow 2,5 kg	19 November 2025	900/1.3.3/278/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 57.000,00	Rp 342.000,00	19-Nov-25	6	Rp 57.000,00	Rp 342.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 57.000,00	Rp -
1122	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Sambal ABC Asli SCH 21's/Pck	Sambal ABC Asli SCH 21's/Pck	19 November 2025	900/1.3.3/278/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 7.400,00	Rp 74.000,00	19-Nov-25	10	Rp 7.400,00	Rp 74.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 7.400,00	Rp -
1123	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kecap ABC Ref 825ml	Kecap ABC Ref 825ml	19 November 2025	900/1.3.3/278/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 26.000,00	Rp 26.000,00	19-Nov-25	1	Rp 26.000,00	Rp 26.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 26.000,00	Rp -
1124	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Saus ABC Tomat 1000gr	Saus ABC Tomat 1000gr	19 November 2025	900/1.3.3/278/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 20.900,00	Rp 20.900,00	19-Nov-25	1	Rp 20.900,00	Rp 20.900,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 20.900,00	Rp -
1125	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Saus ABC Asli 1000gr	Saus ABC Asli 1000gr	19 November 2025	900/1.3.3/278/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 32.500,00	Rp 32.500,00	19-Nov-25	1	Rp 32.500,00	Rp 32.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 32.500,00	Rp -
1126	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kernel Corn 425gr	Kernel Corn 425gr	19 November 2025	900/1.3.3/278/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 8.800,00	Rp 52.800,00	19-Nov-25	6	Rp 8.800,00	Rp 52.800,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 8.800,00	Rp -
1127	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Ag. Nutrijell lychee 15gr/box	Ag. Nutrijell lychee 15gr/box	19 November 2025	900/1.3.3/278/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 64.500,00	Rp 322.500,00	19-Nov-25	5	Rp 64.500,00	Rp 322.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 64.500,00	Rp -
1128	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Ag. Nutrijell Melon 15gr/box	Ag. Nutrijell Melon 15gr/box	19 November 2025	900/1.3.3/278/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 64.500,00	Rp 322.500,00	19-Nov-25	5	Rp 64.500,00	Rp 322.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 64.500,00	Rp -
1129	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Ag. Nutrijell Mangga 15gr/box	Ag. Nutrijell Mangga 15gr/box	19 November 2025	900/1.3.3/278/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 64.500,00	Rp 322.500,00	19-Nov-25	5	Rp 64.500,00	Rp 322.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 64.500,00	Rp -
1130	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Ag. Nutrijell Blueberry 15gr/box	Ag. Nutrijell Blueberry 15gr/box	19 November 2025	900/1.3.3/278/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 57.800,00	Rp 289.000,00	19-Nov-25	5	Rp 57.800,00	Rp 289.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 57.800,00	Rp -
1131	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Minyak Goreng Sunco Ref 2lt	Minyak Goreng Sunco Ref 2lt	19 November 2025	900/1.3.3/278/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 235.000,00	Rp 470.000,00	19-Nov-25	2	Rp 235.000,00	Rp 470.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 235.000,00	Rp -
1132	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Gula Pasir /kg	Gula Pasir /kg	19 November 2025	900/1.3.3/278/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	30	Rp 13.400,00	Rp 402.000,00	19-Nov-25	30	Rp 13.400,00	Rp 402.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 13.400,00	Rp -
1133	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Toples Unity 123, 250gr (12 pcs)	Toples Unity 123, 250gr (12 pcs)	19 November 2025	900/1.3.3/279/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 65.000,00	Rp 130.000,00	19-Nov-25	2	Rp 65.000,00	Rp 130.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 65.000,00	Rp -
1134	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Santan Kelapa Kara Sun 200ml	Santan Kelapa Kara Sun 200ml	23 November 2025	900/1.3.3/280/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 16.000,00	Rp 96.000,00	23-Nov-25	6	Rp 16.000,00	Rp 96.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 16.000,00	Rp -
1135	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kacang Hijau Kupas /Pck 500gr	Kacang Hijau Kupas /Pck 500gr	23 November 2025	900/1.3.3/280/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 20.000,00	Rp 40.000,00	23-Nov-25	2	Rp 20.000,00	Rp 40.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 20.000,00	Rp -
1136	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Tepung Ketan Rose Brand 500gr	Tepung Ketan Rose Brand 500gr	23 November 2025	900/1.3.3/280/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 61.800,00	Rp 61.800,00	23-Nov-25	1	Rp 61.800,00	Rp 61.800,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 61.800,00	Rp -
1137	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Tepung Ketan Rose Brand 500gr	Tepung Ketan Rose Brand 500gr	23 November 2025	900/1.3.3/280/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 10.400,00	Rp 41.600,00	23-Nov-25	4	Rp 10.400,00	Rp 41.600,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 10.400,00	Rp -
1138	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Tepung Beras Rose Brand 500gr	Tepung Beras Rose Brand 500gr	23 November 2025	900/1.3.3/280/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 7.600,00	Rp 30.400,00	23-Nov-25	4	Rp 7.600,00	Rp 30.400,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 7.600,00	Rp -
1139	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kacang Hijau /Pck 1kg	Kacang Hijau /Pck 1kg	23 November 2025	900/1.3.3/280/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 24.200,00	Rp 48.400,00	23-Nov-25	2	Rp 24.200,00	Rp 48.400,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 24.200,00	Rp -
1140	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Gula Merah Elang 10kg/Pck 50(	Gula Merah Elang 10kg/Pck 500gr	23 November 2025	900/1.3.3/280/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 14.500,00	Rp 145.000,00	23-Nov-25	10	Rp 14.500,00	Rp 145.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 14.500,00	Rp -
1141	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Pulut Putih /Pck 1 Kg	Pulut Putih /Pck 1 Kg	23 November 2025	900/1.3.3/280/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	8	Rp 15.800,00	Rp 126.400,00	23-Nov-25	8	Rp 15.800,00	Rp 126.400,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 15.800,00	Rp -
1142	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Ayam Potong	Ayam Potong	24 November 2025	900/1.3.3/281/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	19,91	Rp 33.000,00	Rp 657.000,00	24-Nov-25	19,91	Rp 33.000,00	Rp 657.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 33.000,00	Rp -
1143	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Bawang Putih /Pck 500gr	Bawang Putih /Pck 500gr	24 November 2025	900/1.3.3/282/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 15.800,00	Rp 63.200,00	24-Nov-25	4	Rp 15.800,00	Rp 63.200,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 15.800,00	Rp -
1144	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Bawang Merah India /Pck 500gr	Bawang Merah India /Pck 500gr	24 November 2025	900/1.3.3/282/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	8	Rp 9.000,00	Rp 72.000,00	24-Nov-25	8	Rp 9.000,00	Rp 72.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 9.000,00	Rp -
1145	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Totole Kaldu Jamur 200gr	Totole Kaldu Jamur 200gr	24 November 2025	900/1.3.3/282/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 26.000,00	Rp 52.000,00	24-Nov-25	2	Rp 26.000,00	Rp 52.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 26.000,00	Rp -
1146	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Cabe Nano	Cabe Nano	24 November 2025	900/1.3.3/282/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 55.000,00	Rp 55.000,00	24-Nov-25	1	Rp 55.000,00	Rp 55.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 55.000,00	Rp -
1147	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Pulut Putih /Pck 1 Kg	Pulut Putih /Pck 1 Kg	24 November 2025	900/1.3.3/282/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 15.800,00	Rp 63.200,00	24-Nov-25	4	Rp 15.800,00	Rp 63.200,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 15.800,00	Rp -
1148	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Cabe Merah 1 Kg	Cabe Merah 1 Kg	24 November 2025	900/1.3.3/282/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 76.000,00	Rp 152.000,00	24-Nov-25	2	Rp 76.000,00	Rp 152.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 76.000,00	Rp -
1149	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Jeruk Sambal	Jeruk Sambal	24 November 2025	900/1.3.3/282/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,51	Rp 16.000,00	Rp 8.160,00	24-Nov-25	0,51	Rp 16.000,00	Rp 8.160,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 16.000,00	Rp -
1150	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Serai	Serai	24 November 2025	900/1.3.3/282/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,545	Rp 12.000,00	Rp 6.540,00	24-Nov-25	0,545	Rp 12.000,00	Rp 6.540,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 12.000,00	Rp -
1151	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Ajinomoto 500gr	Ajinomoto 500gr	24 November 2025	900/1.3.3/282/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	24-Nov-25	1	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 25.000,00	Rp -
1152	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kunyit	Kunyit	24 November 2025	900/1.3.3/282/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,08	Rp 20.000,00	Rp 1.600,00	24-Nov-25	0,08	Rp 20.000,00	Rp 1.600,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 20.000,00	Rp -
1153	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Malabar Kunyit /Pck 50gr	Malabar Kunyit /Pck 50gr	24 November 2025	900/1.3.3/282/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 6.200,00	Rp 6.200,00	24-Nov-25	1	Rp 6.200,00	Rp 6.200,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 6.200,00	Rp -
1154	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Telur Ayam No. 2/P-10	Telur Ayam No. 2/P-10	24 November 2025	900/1.3.3/282/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 19.500,00	Rp 39.000,00	24-Nov-25	2	Rp 19.500,00	Rp 39.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 19.500,00	Rp -
1155	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Bawang Goreng 400gr	Bawang Goreng 400gr	24 November 2025	900/1.3.3/282/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 21.500,00	Rp 21.500,00	24-Nov-25	1	Rp 21.500,00	Rp 21.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 21.500,00	Rp -
1156	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Tomat Buah	Tomat Buah	24 November 2025	900/1.3.3/282/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1,57	Rp 14.000,00	Rp 21.980,00	24-Nov-25	1,57	Rp 14.000,00	Rp 21.980,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 14.000,00	Rp -
1157	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kemiri /Pck	Kemiri /Pck	24 November 2025	900/1.3.3/282/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 7.000,00	Rp 7.000,00	24-Nov-25	1	Rp 7.000,00	Rp 7.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 7.000,00	Rp -
1158	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Terasi Udang	Terasi Udang	24 November 2025	900/1.3.3/282/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 6.900,00	Rp 6.900,00	24-Nov-25	1	Rp 6.900,00	Rp 6.900,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 6.900,00	Rp -
1159	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kecap ABC Manis	Kecap ABC Manis	24 November 2025	900/1.3.3/282/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 29.500,00	Rp 29.500,00	24-Nov-25	1	Rp 29.500,00	Rp 29.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 29.500,00	Rp -
1160	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Timun	Timun	24 November 2025	900/1.3.3/282/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5,068	Rp 15.000,00	Rp 76.020,00	24-Nov-25	5,068	Rp 15.000,00	Rp 76.020,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 15.000,00	Rp -
1161	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kentang	Kentang	24 November 2025	900/1.3.3/282/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2,06	Rp 22.978,00	Rp 47.334,00	24-Nov-25	2,06	Rp 22.978,00	Rp 47.334,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 22.978,00	Rp -
1162	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kentang	Kentang	24 November 2025	900/1.3.3/282/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 22.969,33	Rp 68.908,00	24-Nov-25	3	Rp 22.969,33	Rp 68.908,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 22.969,33	Rp -
1163	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kencur	Kencur	24 November 2025	900/1.3.3/282/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 58.290,00	Rp 58.290,00	24-Nov-25	1	Rp 58.290,00	Rp 58.290,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 58.290,00	Rp -
1164	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Lengkuas	Lengkuas	24 November 2025	900/1.3.3/282/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,41	Rp 16.000,00	Rp 6.560,00	24-Nov-25	0,41	Rp 16.000,00	Rp 6.560,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 16.000,00	Rp -
1165	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Wortel	Wortel	24 November 2025	900/1.3.3/282/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2,145	Rp 20.000,00	Rp 42.900,00	24-Nov-25	2,145	Rp 20.000,00	Rp 42.900,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 20.000,00	Rp -
1166	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kol	Kol	24 November 2025	900/1.3.3/282/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 39.888,00	Rp 39.888,00	24-Nov-25	1	Rp 39.888,00	Rp 39.888,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 39.888,00	Rp -
1167	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Bihun 1,5 Kg	Bihun 1,5 Kg	24 November 2025	900/1.3.3/282/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 38.500,00	Rp 38.500,00	24-Nov-25	1	Rp 38.500,00	Rp 38.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 38.500,00	Rp -
1168	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Tahu	Tahu	24 November 2025	900/1.3.3/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	70	Rp 1.000,00	Rp 70.000,00	24-Nov-25	70	Rp 1.000,00	Rp 70.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 1.000,00	Rp -
1169	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	SKM Bendera Omela 490gr	SKM Bendera Omela 490gr	24 November 2025	900/1.3.3/284/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 14.900,00	Rp 29.800,00	24-Nov-25	2	Rp 14.900,00	Rp 29.800,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 14.900,00	Rp -
1170	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Bihun	Bihun	24 November 2025	900/1.3.3/284/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 19.600,00	Rp 19.600,00	24-Nov-25	1	Rp 19.600,00	Rp 19.600,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 19.600,00	Rp -
1171	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Asam Cap Matahari	Asam Cap Matahari	24 November 2025	900/1.3.3/284/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 12.000,00	Rp 12.000,00	24-Nov-25	1	Rp 12.000,00	Rp 12.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 12.000,00	Rp -
1172	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Udang Rebon	Udang Rebon	24 November 2025	900/1.3.3/284/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 7.200,00	Rp 7.200,00	24-Nov-25	1	Rp 7.200,00	Rp 7.200,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 7.200,00	Rp -
1173	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Jahe	Jahe	24 November 2025	900/1.3.3/285/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,5	Rp 30.000,00	Rp 15.000,00	24-Nov-25	0,5	Rp 30.000,00	Rp 15.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 30.000,00	Rp -
1174	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Udang Tambak 500gr	Udang Tambak 500gr	24 November 2025	900/1.3.3/287/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 66.500,00	Rp 133.000,00	24-Nov-25	2	Rp 66.500,00	Rp 133.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 66.500,00	Rp -
1175	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Selada Hidroponik	Selada Hidroponik	24 November 2025	900/1.3.3/287/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 10.000,00	Rp 60.000,00	24-Nov-25	6	Rp 10.000,00	Rp 60.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 10.000,00	Rp -
1176	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Bihun Mamamia 1,5 Kg	Bihun Mamamia 1,5 Kg	24 November 2025	900/1.3.3/288/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 39.500,00	Rp 39.500,00	24-Nov-25	1	Rp 39.500,00	Rp 39.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 39.500,00	Rp -
1177	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Cipir	Cipir	24 November 2025	900/1.3.3/288/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 4.480,00	Rp 22.400,00	24-Nov-25	5	Rp 4.480,00	Rp 22.400,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 4.480,00	Rp -
1178	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kacang Panjang	Kacang Panjang	24 November 2025	900/1.3.3/288/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 2.529,00	Rp 15.174,00	24-Nov-25	6	Rp 2.529,00	Rp 15.174,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 2.529,00	Rp -
1179	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kunyit	Kunyit	24 November 2025	900/1.3.3/288/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 6.084,00	Rp 6.084,00	24-Nov-25	1	Rp 6.084,00	Rp 6.084,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 6.084,00	Rp -
1180	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Longan	Longan	24 November 2025	900/1.3.3/288/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 31.372,00	Rp 62.744,00	24-Nov-25	2	Rp 31.372,00	Rp 62.744,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 31.372,00	Rp -
1181	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Daun Bawang	Daun Bawang	24 November 2025	900/1.3.3/288/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 5.600,00	Rp 5.600,00	24-Nov-25	1	Rp 5.600,00	Rp 5.600,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 5.600,00	Rp -
1182	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Bawang Bombay Curah	Bawang Bombay Curah	24 November 2025	900/1.3.3/288/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 23.138,00	Rp 23.138,00	24-Nov-25	1	Rp 23.138,00	Rp 23.138,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 23.138,00	Rp -
1183

NO	JENIS REKENING		NAMA BARANG	MEREK	PENERIMAAN					PENGELUARAN						SISA		
					Tanggal Terima	No/Tgl.Surat Dasar Penerimaan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Tanggal Keluar	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Peruntukan		Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2		3	4	5	6	7	8	9 (7x8)	10	11	12	13 (11x12)	14		15	16	17
1221	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	WORTEL	WORTEL	04 Desember 2025	900/1.3.3/305/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 12.960,00	Rp 12.960,00	04-Dec-25	1	Rp 12.960,00	Rp 12.960,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 12.960,00	Rp -
1222	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	WORTEL	WORTEL	04 Desember 2025	900/1.3.3/305/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 13.536,00	Rp 13.536,00	04-Dec-25	1	Rp 13.536,00	Rp 13.536,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 13.536,00	Rp -
1223	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	WORTEL	WORTEL	04 Desember 2025	900/1.3.3/305/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 12.024,00	Rp 12.024,00	04-Dec-25	1	Rp 12.024,00	Rp 12.024,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 12.024,00	Rp -
1224	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	VERMICILLI	VERMICILLI	04 Desember 2025	900/1.3.3/305/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 4.500,00	Rp 4.500,00	04-Dec-25	1	Rp 4.500,00	Rp 4.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 4.500,00	Rp -
1225	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	VERMICILLI	VERMICILLI	04 Desember 2025	900/1.3.3/305/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 4.500,00	Rp 4.500,00	04-Dec-25	1	Rp 4.500,00	Rp 4.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 4.500,00	Rp -
1226	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	VERMICILLI	VERMICILLI	04 Desember 2025	900/1.3.3/305/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 4.500,00	Rp 4.500,00	04-Dec-25	1	Rp 4.500,00	Rp 4.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 4.500,00	Rp -
1227	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	VERMICILLI	VERMICILLI	04 Desember 2025	900/1.3.3/305/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 4.500,00	Rp 4.500,00	04-Dec-25	1	Rp 4.500,00	Rp 4.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 4.500,00	Rp -
1228	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	IKAN SELAR	IKAN SELAR	07 Desember 2025	900/1.3.3/309/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	7,3	Rp 401.500,00	Rp 401.500,00	07-Dec-25	7,3	Rp 55.000,00	Rp 401.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 55.000,00	Rp -
1229	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	TISSUE WARNA	TISSUE WARNA	07 Desember 2025	900/1.3.3/309/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 7.000,00	Rp 14.000,00	07-Dec-25	2	Rp 7.000,00	Rp 14.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 7.000,00	Rp -
1230	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kentang	Kentang	07 Desember 2025	900/1.3.3/310/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2,97	Rp 20.000,00	Rp 59.400,00	07-Dec-25	2,97	Rp 20.000,00	Rp 59.400,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 20.000,00	Rp -
1231	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Home Industry (Kerupuk)	Home Industry (Kerupuk)	07 Desember 2025	900/1.3.3/310/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 18.000,00	Rp 108.000,00	07-Dec-25	6	Rp 18.000,00	Rp 108.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 18.000,00	Rp -
1232	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Frz. Ikan/Daging	Frz. Ikan/Daging	07 Desember 2025	900/1.3.3/310/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5,00	Rp 19.200,00	Rp 96.000,00	07-Dec-25	5	Rp 19.200,00	Rp 96.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 19.200,00	Rp -
1233	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Wortel	Wortel	07 Desember 2025	900/1.3.3/311/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 35.000,00	Rp 70.000,00	07-Dec-25	2	Rp 35.000,00	Rp 70.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 35.000,00	Rp -
1234	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Bawang Merah /Kg	Bawang Merah /Kg	07 Desember 2025	900/1.3.3/311/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 28.000,00	Rp 56.000,00	07-Dec-25	2	Rp 28.000,00	Rp 56.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 28.000,00	Rp -
1235	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Bawang Putih No. 1 /Kg	Bawang Putih No. 1 /Kg	07 Desember 2025	900/1.3.3/311/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 38.000,00	Rp 38.000,00	07-Dec-25	1	Rp 38.000,00	Rp 38.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 38.000,00	Rp -
1236	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Bumbu Ketumbar Bubuk 12,5gr	Bumbu Ketumbar Bubuk 12,5gr	07 Desember 2025	900/1.3.3/311/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 3.000,00	Rp 3.000,00	07-Dec-25	1	Rp 3.000,00	Rp 3.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 3.000,00	Rp -
1237	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Buncis /Kg	Buncis /Kg	07 Desember 2025	900/1.3.3/311/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 35.000,00	Rp 35.000,00	07-Dec-25	1	Rp 35.000,00	Rp 35.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 35.000,00	Rp -
1238	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Santan	Santan	08 Desember 2025	900/1.3.3/316/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 30.000,00	Rp 60.000,00	08-Dec-25	2	Rp 30.000,00	Rp 60.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 30.000,00	Rp -
1239	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Daging Segar	Daging Segar	08 Desember 2025	900/1.3.3/312/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3,5	Rp 150.000,00	Rp 525.000,00	08-Dec-25	3,5	Rp 150.000,00	Rp 525.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 150.000,00	Rp -
1240	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Cabe Merah /Kg	Cabe Merah /Kg	08 Desember 2025	900/1.3.3/314/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1,35	Rp 92.000,00	Rp 124.200,00	08-Dec-25	1,35	Rp 92.000,00	Rp 124.200,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 92.000,00	Rp -
1241	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Carrot Bebela Ikan 200 bb	Carrot Bebela Ikan 200 bb	08 Desember 2025	900/1.3.3/314/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3	Rp 16.000,00	Rp 48.000,00	08-Dec-25	3	Rp 16.000,00	Rp 48.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 16.000,00	Rp -
1242	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Jeruk Medan (5,5 Kg)	Jeruk Medan (5,5 Kg)	08 Desember 2025	900/1.3.3/317/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 165.700,00	Rp 165.700,00	08-Dec-25	1	Rp 165.700,00	Rp 165.700,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 165.700,00	Rp -
1243	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Batang Serai	Batang Serai	08 Desember 2025	900/1.3.3/313/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1,000	Rp 15.030,00	Rp 15.030,00	08-Dec-25	1	Rp 15.030,00	Rp 15.030,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 15.030,00	Rp -
1244	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Jahe	Jahe	08 Desember 2025	900/1.3.3/313/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 39.902,00	Rp 39.902,00	08-Dec-25	1	Rp 39.902,00	Rp 39.902,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 39.902,00	Rp -
1245	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Labu Siam	Labu Siam	08 Desember 2025	900/1.3.3/315/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2,034	Rp 15.000,00	Rp 30.510,00	08-Dec-25	2,034	Rp 15.000,00	Rp 30.510,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 15.000,00	Rp -
1246	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Terong Ungu Lokal (Kg)	Terong Ungu Lokal (Kg)	08 Desember 2025	900/1.3.3/315/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2,046	Rp 18.000,00	Rp 36.828,00	08-Dec-25	2,046	Rp 18.000,00	Rp 36.828,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 18.000,00	Rp -
1247	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kacang Panjang (Kg)	Kacang Panjang (Kg)	08 Desember 2025	900/1.3.3/315/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,558	Rp 15.000,00	Rp 8.370,00	08-Dec-25	0,558	Rp 15.000,00	Rp 8.370,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 15.000,00	Rp -
1248	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Santan (Kg)	Santan (Kg)	08 Desember 2025	900/1.3.3/315/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 38.000,00	Rp 38.000,00	08-Dec-25	1	Rp 38.000,00	Rp 38.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 38.000,00	Rp -
1249	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Daun Jeruk	Daun Jeruk	08 Desember 2025	900/1.3.3/315/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 1.000,00	Rp 2.000,00	08-Dec-25	2	Rp 1.000,00	Rp 2.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 1.000,00	Rp -
1250	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Santan	Santan	09 Desember 2025	900/1.3.3/318/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	09-Dec-25	1	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 30.000,00	Rp -
1251	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Ikan Selar	Ikan Selar	09 Desember 2025	900/1.3.3/319/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4,5	Rp 45.000,00	Rp 202.500,00	09-Dec-25	4,5	Rp 45.000,00	Rp 202.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 45.000,00	Rp -
1252	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Bumbu Racik 20gr	Bumbu Racik 20gr	09 Desember 2025	900/1.3.3/319/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 1.650,00	Rp 16.500,00	09-Dec-25	10	Rp 1.650,00	Rp 16.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 1.650,00	Rp -
1253	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Melon Oren	Melon Oren	09 Desember 2025	900/1.3.3/321/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3,5	Rp 24.857,14	Rp 87.000,00	09-Dec-25	3,5	Rp 24.857,14	Rp 87.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 24.857,14	Rp -
1254	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Melon Oren	Melon Oren	09 Desember 2025	900/1.3.3/321/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1,8	Rp 25.000,00	Rp 45.000,00	09-Dec-25	1,8	Rp 25.000,00	Rp 45.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 25.000,00	Rp -
1255	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Ayam Potong (8 ekor)	Ayam Potong (8 ekor)	09 Desember 2025	900/1.3.3/322/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	14,3	Rp 35.000,00	Rp 500.500,00	09-Dec-25	14,3	Rp 35.000,00	Rp 500.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 35.000,00	Rp -
1256	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Cabe Merah 1kg	Cabe Merah 1kg	09 Desember 2025	900/1.3.3/326/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 87.000,00	Rp 174.000,00	09-Dec-25	2	Rp 87.000,00	Rp 174.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 87.000,00	Rp -
1257	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Melinjo	Melinjo	09 Desember 2025	900/1.3.3/326/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 22.110,00	Rp 22.110,00	09-Dec-25	1	Rp 22.110,00	Rp 22.110,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 22.110,00	Rp -
1258	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Daun Sop	Daun Sop	09 Desember 2025	900/1.3.3/326/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 3.300,00	Rp 3.300,00	09-Dec-25	1	Rp 3.300,00	Rp 3.300,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 3.300,00	Rp -
1259	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Labu Siam	Labu Siam	09 Desember 2025	900/1.3.3/326/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 12.650,00	Rp 12.650,00	09-Dec-25	1	Rp 12.650,00	Rp 12.650,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 12.650,00	Rp -
1260	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Tomat Buah	Tomat Buah	09 Desember 2025	900/1.3.3/326/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 17.085,00	Rp 17.085,00	09-Dec-25	1	Rp 17.085,00	Rp 17.085,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 17.085,00	Rp -
1261	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Sayur Mayur (Sayur Nangka)	Sayur Mayur (Sayur Nangka)	09 Desember 2025	900/1.3.3/326/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 5.632,00	Rp 5.632,00	09-Dec-25	1	Rp 5.632,00	Rp 5.632,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 5.632,00	Rp -
1262	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Sayur Mayur (Sayur Nangka)	Sayur Mayur (Sayur Nangka)	09 Desember 2025	900/1.3.3/326/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 6.048,00	Rp 6.048,00	09-Dec-25	1	Rp 6.048,00	Rp 6.048,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 6.048,00	Rp -
1263	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Sayur Mayur (Sayur Nangka)	Sayur Mayur (Sayur Nangka)	09 Desember 2025	900/1.3.3/326/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 3.872,00	Rp 3.872,00	09-Dec-25	1	Rp 3.872,00	Rp 3.872,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 3.872,00	Rp -
1264	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Sayur Mayur (Sayur Nangka)	Sayur Mayur (Sayur Nangka)	09 Desember 2025	900/1.3.3/326/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 4.192,00	Rp 4.192,00	09-Dec-25	1	Rp 4.192,00	Rp 4.192,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 4.192,00	Rp -
1265	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Sayur Mayur (Sayur Nangka)	Sayur Mayur (Sayur Nangka)	09 Desember 2025	900/1.3.3/326/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 6.368,00	Rp 6.368,00	09-Dec-25	1	Rp 6.368,00	Rp 6.368,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 6.368,00	Rp -
1266	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kacang Panjang	Kacang Panjang	09 Desember 2025	900/1.3.3/326/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 8.330,00	Rp 8.330,00	09-Dec-25	1	Rp 8.330,00	Rp 8.330,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 8.330,00	Rp -
1267	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Ketumbar /Pck 500gr	Ketumbar /Pck 500gr	09 Desember 2025	900/1.3.3/326/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 14.400,00	Rp 28.800,00	09-Dec-25	2	Rp 14.400,00	Rp 28.800,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 14.400,00	Rp -
1268	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Tepung Maizena Marnasuka 1 kg	Tepung Maizena Marnasuka 1 kg	09 Desember 2025	900/1.3.3/326/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 21.500,00	Rp 107.500,00	09-Dec-25	5	Rp 21.500,00	Rp 107.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 21.500,00	Rp -
1269	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Buah Kemiri /Pck 500gr	Buah Kemiri /Pck 500gr	09 Desember 2025	900/1.3.3/326/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 31.500,00	Rp 31.500,00	09-Dec-25	1	Rp 31.500,00	Rp 31.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 31.500,00	Rp -
1270	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Gula Aren Asli 1 Kg	Gula Aren Asli 1 Kg	09 Desember 2025	900/1.3.3/326/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 43.000,00	Rp 43.000,00	09-Dec-25	1	Rp 43.000,00	Rp 43.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 43.000,00	Rp -
1271	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Ajinomoto Crystal 1 Kg	Ajinomoto Crystal 1 Kg	09 Desember 2025	900/1.3.3/326/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 48.100,00	Rp 48.100,00	09-Dec-25	1	Rp 48.100,00	Rp 48.100,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 48.100,00	Rp -
1272	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Totole Kaldu Jamur 1 Kg	Totole Kaldu Jamur 1 Kg	09 Desember 2025	900/1.3.3/326/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 114.000,00	Rp 114.000,00	09-Dec-25	1	Rp 114.000,00	Rp 114.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 114.000,00	Rp -
1273	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Garam Mamasuka 1 Kg	Garam Mamasuka 1 Kg	09 Desember 2025	900/1.3.3/326/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 14.800,00	Rp 29.600,00	09-Dec-25	2	Rp 14.800,00	Rp 29.600,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 14.800,00	Rp -
1274	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Home Industry	Home Industry	09 Desember 2025	900/1.3.3/326/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 36.000,00	Rp 180.000,00	09-Dec-25	5	Rp 36.000,00	Rp 180.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 36.000,00	Rp -
1275	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Terasi Cap Tomat 10s/pack	Terasi Cap Tomat 10s/pack	09 Desember 2025	900/1.3.3/326/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	5	Rp 5.200,00	Rp 26.000,00	09-Dec-25	5	Rp 5.200,00	Rp 26.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 5.200,00	Rp -
1276	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Jagung (Kg)	Jagung (Kg)	09 Desember 2025	900/1.3.3/325/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	3,876	Rp 16.000,00	Rp 62.016,00	09-Dec-25	3,876	Rp 16.000,00	Rp 62.016,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 16.000,00	Rp -
1277	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	TAHU	TAHU	09 Desember 2025	900/1.3.3/324/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	25	Rp 1.000,00	Rp 25.000,00	09-Dec-25	25	Rp 1.000,00	Rp 25.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 1.000,00	Rp -
1278	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Tempe	Tempe	09 Desember 2025	900/1.3.3/324/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	30	Rp 1.000,00	Rp 30.000,00	09-Dec-25	30	Rp 1.000,00	Rp 30.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 1.000,00	Rp -
1279	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Jeruk Medan (5,5 Kg)	Jeruk Medan (5,5 Kg)	10 Desember 2025	900/1.3.3/331/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4,5	Rp 24.444,44	Rp 110.000,00	10-Dec-25	4,5	Rp 24.444,44	Rp 110.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 24.444,44	Rp -
1280	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kelapa Parut	Kelapa Parut	10 Desember 2025	900/1.3.3/327/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	10-Dec-25	1	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 30.000,00	Rp -
1281	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Bawang Putih	Bawang Putih	10 Desember 2025	900/1.3.3/328/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,5	Rp 42.000,00	Rp 21.000,00	10-Dec-25	0,5	Rp 42.000,00	Rp 21.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 42.000,00	Rp -
1282	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Bawang India /Kg	Bawang India /Kg	10 Desember 2025	900/1.3.3/328/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	10-Dec-25	1	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 25.000,00	Rp -
1283	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Cabe Merah /Kg	Cabe Merah /Kg	10 Desember 2025	900/1.3.3/328/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 85.000,00	Rp 85.000,00	10-Dec-25	1	Rp 85.000,00	Rp 85.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 85.000,00	Rp -
1284	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Lengkuas Giling	Lengkuas Giling	10 Desember 2025	900/1.3.3/328/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 18.000,00	Rp 18.000,00	10-Dec-25	1	Rp 18.000,00	Rp 18.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 18.000,00	Rp -
1285	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Wortel	Wortel	10 Desember 2025	900/1.3.3/328/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 33.000,00	Rp 33.000,00	10-Dec-25	1	Rp 33.000,00	Rp 33.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 33.000,00	Rp -
1286	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kencur	Kencur	10 Desember 2025	900/1.3.3/328/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,86	Rp 58.000,00	Rp 49.880,00	10-Dec-25	0,86	Rp 58.000,00	Rp 49.880,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 58.000,00	Rp -
1287	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kecap Manis Pouch 700gr, Sedi	Kecap Manis Pouch 700gr, Sedaap K	10 Desember 2025	900/1.3.3/329/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 19.500,00	Rp 39.000,00	10-Dec-25	2	Rp 19.500,00	Rp 39.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 19.500,00	Rp -
1288	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kentang	Kentang	10 Desember 2025	900/1.3.3/330/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 31.500,00	Rp 31.500,00	10-Dec-25	1	Rp 31.500,00	Rp 31.500,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 31.500,00	Rp -
1289	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Tepung Segitiga Biru 500gr	Tepung Segitiga Biru 500gr	10 Desember 2025	900/1.3.3/330/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 6.800,00	Rp 6.800,00	10-Dec-25	1	Rp 6.800,00	Rp 6.800,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 6.800,00	Rp -
1290	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Jahe	Jahe	10 Desember 2025	900/1.3.3/330/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 11.725,00	Rp 11.725,00	10-Dec-25	1	Rp 11.725,00	Rp 11.725,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 11.725,00	Rp -
1291	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Telur Ayam No. 2/P-30	Telur Ayam No. 2/P-30	10 Desember 2025	900/1.3.3/330/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 58.000,00	Rp 58.000,00	10-Dec-25	1	Rp 58.000,00	Rp 58.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 58.000,00	Rp -
1292	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Kacang Panjang	Kacang Panjang	11 Desember 2025	900/1.3.3/332/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	0,25	Rp 16.000,00	Rp 4.000,00	11-Dec-25	0,25	Rp 16.000,00	Rp 4.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 16.000,00	Rp -
1293	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Daun Jeruk	Daun Jeruk	11 Desember 2025	900/1.3.3/332/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4	Rp 2.000,00	Rp 8.000,00	11-Dec-25	4	Rp 2.000,00	Rp 8.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 2.000,00	Rp -
1294	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Sunkist	Sunkist	11 Desember 2025	900/1.3.3/333/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	10	Rp 9.000,00	Rp 90.000,00	11-Dec-25	10	Rp 9.000,00	Rp 90.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 9.000,00	Rp -
1295	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Ayam Potong (5 Ekor)	Ayam Potong (5 Ekor)	11 Desember 2025	900/1.3.3/335/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 276.000,00	Rp 276.000,00	11-Dec-25	1	Rp 276.000,00	Rp 276.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 276.000,00	Rp -
1296	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Ayam Potong (5 Ekor)	Ayam Potong (5 Ekor)	12 Desember 2025	900/1.3.3/335/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	8,2	Rp 35.000,00	Rp 287.000,00	12-Dec-25	8,2	Rp 35.000,00	Rp 287.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 35.000,00	Rp -
1297	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Sunkist	Sunkist	12 Desember 2025	900/1.3.3/336/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	12	Rp 9.000,00	Rp 108.000,00	12-Dec-25	12	Rp 9.000,00	Rp 108.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 9.000,00	Rp -
1298	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Tissu Cleanplus	Tissu Cleanplus	12 Desember 2025	900/1.3.3/338/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 7.000,00	Rp 14.000,00	12-Dec-25	2	Rp 7.000,00	Rp 14.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 7.000,00	Rp -
1299	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	Bawang India /Kg	Bawang India /Kg	12 Desember 2025	900/1.3.3/338/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	12-Dec-25	1	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Tefa Kuliner/Coffee Shop		0	Rp 25.000,00	Rp -
1300	0

NO		JENIS REKENING	NAMA BARANG	MEREK	PENERIMAAN					PENGELUARAN					SISA		
					Tanggal Terima	No/Tgl.Surat Dasar Penerimaan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Tanggal Keluar	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Peruntukan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
1		2	3	4	5	6	7	8	9 (7x8)	10	11	12	13 (11x12)	14	15	16	17
1337	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	MENTEGA MENARA PUTIH	MENTEGA MENARA PUTIH	29 Desember 2025	900/1.3.3/377/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 12.000,00	Rp 72.000,00	29-Dec-25	0	Rp 12.000,00	Rp -	Tefa Kuliner/Coffee Shop	6	Rp 12.000,00	Rp 72.000,00
1338	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	KP SEP CAIR 30 ML	KP SEP CAIR 30 ML	29 Desember 2025	900/1.3.3/377/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 3.800,00	Rp 3.800,00	29-Dec-25	0	Rp 3.800,00	Rp -	Tefa Kuliner/Coffee Shop	1	Rp 3.800,00	Rp 3.800,00
1339	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	LADAKU MERICA BUBUK	LADAKU MERICA BUBUK	29 Desember 2025	900/1.3.3/377/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 61.000,00	Rp 61.000,00	29-Dec-25	0	Rp 61.000,00	Rp -	Tefa Kuliner/Coffee Shop	1	Rp 61.000,00	Rp 61.000,00
1340	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	ROYCO SCT AYAM	ROYCO SCT AYAM	29 Desember 2025	900/1.3.3/377/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 29.200,00	Rp 29.200,00	29-Dec-25	0	Rp 29.200,00	Rp -	Tefa Kuliner/Coffee Shop	1	Rp 29.200,00	Rp 29.200,00
1341	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	GARAM BINTANG RANTAI	GARAM BINTANG RANTAI	29 Desember 2025	900/1.3.3/377/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 9.400,00	Rp 18.800,00	29-Dec-25	0	Rp 9.400,00	Rp -	Tefa Kuliner/Coffee Shop	2	Rp 9.400,00	Rp 18.800,00
1342	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	TEPUNG SEGI TIGA BIRU	TEPUNG SEGI TIGA BIRU	29 Desember 2025	900/1.3.3/377/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 143.200,00	Rp 286.400,00	29-Dec-25	0	Rp 143.200,00	Rp -	Tefa Kuliner/Coffee Shop	2	Rp 143.200,00	Rp 286.400,00
1343	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	BAWANG PUTIH	BAWANG PUTIH	29 Desember 2025	900/1.3.3/377/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 160.000,00	Rp 160.000,00	29-Dec-25	0	Rp 160.000,00	Rp -	Tefa Kuliner/Coffee Shop	1	Rp 160.000,00	Rp 160.000,00
1344	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	MAMASUKA TEPUNG MAIZENA	MAMASUKA TEPUNG MAIZENA	29 Desember 2025	900/1.3.3/377/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 21.500,00	Rp 129.000,00	29-Dec-25	0	Rp 21.500,00	Rp -	Tefa Kuliner/Coffee Shop	6	Rp 21.500,00	Rp 129.000,00
1345	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	WINCHEEZ KEJU CHEDDAR	WINCHEEZ KEJU CHEDDAR	29 Desember 2025	900/1.3.3/377/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 546.000,00	Rp 1.092.000,00	29-Dec-25	0	Rp 546.000,00	Rp -	Tefa Kuliner/Coffee Shop	2	Rp 546.000,00	Rp 1.092.000,00
1346	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	TEPUNG KANJI	TEPUNG KANJI	29 Desember 2025	900/1.3.3/377/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	15	Rp 9.000,00	Rp 135.000,00	29-Dec-25	0	Rp 9.000,00	Rp -	Tefa Kuliner/Coffee Shop	15	Rp 9.000,00	Rp 135.000,00
1347	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	TELUR NO 2	TELUR NO 2	30 Desember 2025	900/1.3.3/381/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	4,00	Rp 285.000,00	Rp 1.140.000,00	30-Dec-25	0	Rp 285.000,00	Rp -	Tefa Kuliner/Coffee Shop	4	Rp 285.000,00	Rp 1.140.000,00
1348	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	SELAI NENAS NASTAR ROYAL	SELAI NENAS NASTAR ROYAL	30 Desember 2025	900/1.3.3/379/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	16	Rp 36.000,00	Rp 576.000,00	30-Dec-25	0	Rp 36.000,00	Rp -	Tefa Kuliner/Coffee Shop	16	Rp 36.000,00	Rp 576.000,00
1349	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	ROYAL PALMIA	ROYAL PALMIA	30 Desember 2025	900/1.3.3/379/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 480.000,00	Rp 960.000,00	30-Dec-25	0	Rp 480.000,00	Rp -	Tefa Kuliner/Coffee Shop	2	Rp 480.000,00	Rp 960.000,00
1350	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	ELM CHOCOLATE	ELM CHOCOLATE	30 Desember 2025	900/1.3.3/379/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 80.000,00	Rp 80.000,00	30-Dec-25	0	Rp 80.000,00	Rp -	Tefa Kuliner/Coffee Shop	1	Rp 80.000,00	Rp 80.000,00
1351	0045	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	MENTEGA BLUEBAND	MENTEGA BLUEBAND	30 Desember 2025	900/1.3.3/377/BAST-BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 532.000,00	Rp 532.000,00	30-Dec-25	0	Rp 532.000,00	Rp -	Tefa Kuliner/Coffee Shop	1	Rp 532.000,00	Rp 532.000,00
									Rp 125.973.369,00				Rp 108.160.869,00				Rp 17.812.500,00
1351	0040	Belanja Persediaan Utk Dijual/Diserahkan Kpd Masyarakat	Biaya Masuk Objek Wisata	Wisata Puncak Beliung	22 Mei 2025	080/BLUD-SMKN2TPI/2025	43	Rp 90.000,00	Rp 3.870.000,00	22-May-25	43	Rp 90.000,00	Rp 3.870.000,00	Tefa ULP	0	Rp 90.000,00	Rp -
1352	0040	Belanja Persediaan Utk Dijual/Diserahkan Kpd Masyarakat	Biaya Masuk Objek Wisata	Wisata Taman Rusa Sekupang	22 Mei 2025	081/BLUD-SMKN2TPI/2025	44	Rp 6.570,00	Rp 289.000,00	22-May-25	44	Rp 6.570,00	Rp 289.000,00	Tefa ULP	0	Rp 6.570,00	Rp -
1353	0040	Belanja Persediaan Utk Dijual/Diserahkan Kpd Masyarakat	Beras	Burung Merak 10kg	26 Mei 2025	900/1.13.3/090/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 143.000,00	Rp 143.000,00	26-May-25	1	Rp 143.000,00	Rp 143.000,00	Tefa Kuliner	0	Rp 143.000,00	Rp -
1354	0040	Belanja Persediaan Utk Dijual/Diserahkan Kpd Masyarakat	Beras	Koki Padang 10kg	26 Mei 2025	900/1.13.3/090/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 116.500,00	Rp 233.000,00	26-May-25	2	Rp 116.500,00	Rp 233.000,00	Tefa Kuliner	0	Rp 116.500,00	Rp -
1355	0040	Belanja Persediaan Utk Dijual/Diserahkan Kpd Masyarakat	Regulator Gas	-	19 Agustus 2025	900/1.13.3/162/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	19-Aug-25	1	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Tefa Kuliner	0	Rp 150.000,00	Rp -
1356	0040	Belanja Persediaan Utk Dijual/Diserahkan Kpd Masyarakat	Minyak Goreng	Minyak Fortune 1 Liter	07 Oktober 2025	900/1.13.3/213/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 21.200,00	Rp 21.030,00	07-Oct-25	1	Rp 21.200,00	Rp 21.030,00	Tefa Kuliner	0	Rp 21.200,00	Rp -
1357	0040	Belanja Persediaan Utk Dijual/Diserahkan Kpd Masyarakat	Beras	Cap Pohon Pisang 10 Kg	07 Oktober 2025	900/1.13.3/213/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	07-Oct-25	1	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Tefa Kuliner	0	Rp 150.000,00	Rp -
1358	0040	Belanja Persediaan Utk Dijual/Diserahkan Kpd Masyarakat	Beras	Gajah Merah 5 Kg	07 Oktober 2025	900/1.13.3/213/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 79.000,00	Rp 79.000,00	07-Oct-25	1	Rp 79.000,00	Rp 79.000,00	Tefa Kuliner	0	Rp 79.000,00	Rp -
1359	0040	Belanja Persediaan Utk Dijual/Diserahkan Kpd Masyarakat	Beras	Padang Raya 5 Kg	24 November 2025	900/1.13.3/282/BLUDSMKN2TPI/2025	2	Rp 87.500,00	Rp 175.000,00	24-Nov-25	2	Rp 87.500,00	Rp 175.000,00	Tefa Kuliner	0	Rp 87.500,00	Rp -
1360	0040	Belanja Persediaan Utk Dijual/Diserahkan Kpd Masyarakat	Beras	Harumanis 5 Kg	24 November 2025	900/1.13.3/282/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 77.000,00	Rp 77.000,00	24-Nov-25	1	Rp 77.000,00	Rp 77.000,00	Tefa Kuliner	0	Rp 77.000,00	Rp -
1361	0040	Belanja Persediaan Utk Dijual/Diserahkan Kpd Masyarakat	Beras	Padang Raya	04 Desember 2025	900/1.13.3/299/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 87.500,00	Rp 87.500,00	04-Dec-25	1	Rp 87.500,00	Rp 87.500,00	Tefa Kuliner	0	Rp 87.500,00	Rp -
1362	0040	Belanja Persediaan Utk Dijual/Diserahkan Kpd Masyarakat	Beras	Harumas	04 Desember 2025	900/1.13.3/299/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 38.500,00	Rp 38.500,00	04-Dec-25	1	Rp 38.500,00	Rp 38.500,00	Tefa Kuliner	0	Rp 38.500,00	Rp -
1363	0040	Belanja Persediaan Utk Dijual/Diserahkan Kpd Masyarakat	Beras	Harumas 5 Kg	04 Desember 2025	900/1.13.3/304/BLUDSMKN2TPI/2025	1	Rp 77.000,00	Rp 77.000,00	04-Dec-25	1	Rp 77.000,00	Rp 77.000,00	Tefa Kuliner	0	Rp 77.000,00	Rp -
1364	0040	Belanja Persediaan Utk Dijual/Diserahkan Kpd Masyarakat	Beras	Beras Minang	08 Desember 2025	900/1.13.3/314/BLUDSMKN2TPI/2025	25	Rp 12.320,00	Rp 308.000,00	08-Dec-25	25	Rp 12.320,00	Rp 308.000,00	Tefa Kuliner	0	Rp 12.320,00	Rp -
1365	0040	Belanja Persediaan Utk Dijual/Diserahkan Kpd Masyarakat	Beras	Beras Sunkist	08 Desember 2025	900/1.13.3/314/BLUDSMKN2TPI/2025	25	Rp 13.800,00	Rp 345.000,00	08-Dec-25	25	Rp 13.800,00	Rp 345.000,00	Tefa Kuliner	0	Rp 13.800,00	Rp -
1366	0040	Belanja Persediaan Utk Dijual/Diserahkan Kpd Masyarakat	Biaya Masuk Objek Wisata	Objek Safari Lagoi	16 Desember 2025	394/BLUD-SMKN2TPI/2025	43	Rp 50.000,00	Rp 2.150.000,00	16-Dec-25	43	Rp 50.000,00	Rp 2.150.000,00	Tefa ULP	0	Rp 50.000,00	Rp -
1367	0040	Belanja Persediaan Utk Dijual/Diserahkan Kpd Masyarakat	Biaya Masuk Objek Wisata	Objek Gurun Pasir	16 Desember 2025	395/BLUD-SMKN2TPI/2025	43	Rp 10.000,00	Rp 430.000,00	16-Dec-25	43	Rp 10.000,00	Rp 430.000,00	Tefa ULP	0	Rp 10.000,00	Rp -
		Total 'Belanja Persediaan Utk Dijual/Diserahkan Kpd Masyarakat							Rp 8.623.030,00								
1368	0015	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran	Cotton Buds	Dodo Cott Buds	19 Mei 2025	900/1.13.3/068/BLUDSMKN2TPI/2025	6	Rp 7.500,00	Rp 45.000,00	19-May-25	6	Rp 7.500,00	Rp 45.000,00	Toko Selasih	0	Rp 7.500,00	Rp -
		TOTAL Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran							**Rp 45.000,00**				**Rp 8.668.030,00**				**Rp -**
		TOTAL BELANJA BLUD TA 2025							**Rp 218.867.543,00**				**Rp 191.803.613,00**				**Rp 35.686.960,00**

MENGETAHUI,

Pimpinan Satuan SMK Negeri 2 Tanjungpinang

SUPINI, S.Pd
NIP 196604171990032006

Tanjungpinang, 23 Februari 2026

PENGURUS BARANG

SRI ASTUTI, S.Pd
NIP 198208242009022002

LAPORAN KEUANGAN

BLUD SMKN 3 TANJUNGPINANG

TAHUN 2025

(AUDITED)

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi i
Daftar Tabel ii
Kata Pengantar iii
Pernyataan Tanggungjawab iv
LAPORAN KEUANGAN
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja v
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih viii
Laporan Neraca ix
Laporan Operasional xii
Laporan Arus Kas xiv
Laporan Perubahan Ekuitas xvi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 2
1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang 3
1.4 Periode Pelaporan Keuangan 3
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 3
BAB II PROFIL BLUD SMK NEGERI 3 TANJUNGPINANG
2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang 5
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang 8
2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang Tahun 2025 12
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025 13
3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai dalam Pencapaian Target Realisasi 13
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 14
4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan 14
4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 14
4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 14
4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan 15
4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja 15
4.7 Kebijakan Akuntansi Kas 15
4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan 16
4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap 16
4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban 17
BAB V RINCIAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 18
5.2 Penjelasan pos-pos Laporan Saldo Anggran Lebih 20
5.3 Neraca 20
5.4 Laporan Operasional 25
5.5 Laporan Arus Kas 27
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas 30
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN
6.1 Domisili dan Bentuk Entitas Pelaporan 32
6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan 32
BAB VII PENUTUP 33

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja v
Tabel Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih viii
Tabel Laporan Neraca ix
Tabel Laporan Operasional xii
Tabel Laporan Arus Kas xiv
Tabel Laporan Perubahan Ekuitas xvi
Tabel Data Tenaga Pendidik SMKN 3 Tanjungpinang Tahun 2025 5
Tabel Data Tenaga Kependidikan SMKN 3 Tanjungpinang Tahun 2025 5
Tabel Data Peserta Didik SMKN 3 Tanjungpinang Tahun 2025 6
Tabel Program dan Kegiatan BLUD SMKN 3 Tanjungpinang 12
Tabel Pendapatan LRA 18
Tabel Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 18
Tabel Pendapatan BLUD dari Hibah 19
Tabel Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain 19
Tabel Pendapatan BLUD dari APBD/APBN 19
Tabel Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah 19
Tabel Belanja Pegawai BLUD 19
Tabel Belanja Barang dan Jasa 20
Tabel Belanja Modal BLUD 20
Tabel Kas di Bendahara BLUD 21
Tabel Kas di Bendahara BOS 21
Tabel Kas di Bendahara Bantuan Pemerintah (Sekolah Pusat Keunggulan) 21
Tabel Persediaan 22
Tabel Aset Tetap Peralatan dan Mesin 22
Tabel Aset Tetap Gedung dan Bangunan 22
Tabel Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan 23
Tabel Aset Tetap Lainnya 23
Tabel Saldo Awal Aset lainnya 24
Tabel Ekuitas 24
Tabel Pendapatan LO dari Kegiatan Operasional 25
Tabel Pendapatan BLUD dari Hibah LO 25
Tabel Pendapatan BLUD dari hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO 25
Tabel Pendapatan BLUD dari APBD/APBN LO 26
Tabel Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah LO 26
Tabel Belanja Pegawai BLUD LO 26
Tabel Belanja Barang dan Jasa LO 26
Tabel Arus Masuk Kas dari Aktifitas Operasi 27
Tabel Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi 28
Tabel Arus Masuk Kas dari Aktifitas Investasi 28
Tabel Arus Keluar Kas dari Aktifitas Investasi 29
Tabel Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Peride 2025 30
Tabel Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025 30

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kami berharap dengan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) di Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 25 Mei 2026

Pimpinan BLUD SMKN 3 Tanjungpinang
Provinsi Kepulauan Riau

Samsul Hadi, S.Pd.,M.Pd.
Pembina Utama Muda/IV-c
Nip. 196908191998031007

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan SMK Negeri 3 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (v) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja; (viii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (ix) Laporan Neraca; (xii) Laporan Operasional; (xiv) Laporan Arus Kas; (xvi) Laporan Perubahan Ekuitas: selanjutnya Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 25 Mei 2026

Pimpinan BLUD SMKN 3 Tanjungpinang
Provinsi Kepulauan Riau

Samsul Hadi, S.Pd.,M.Pd.
Pembina Utama Muda/IV-c
Nip. 196908191998031007

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 3 TANJUNG PINANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**46.050.000,00**	**26.636.464,00**	**57,84**	**0,00**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**46.050.000,00**	**26.636.464,00**	**57,84**	**0,00**
4.1.04.	**Lain-lain PAD yang Sah**	**46.050.000,00**	**26.636.464,00**	**57,84**	**0,00**
4.1.04.16.	**Pendapatan BLUD**	**46.050.000,00**	**26.636.464,00**	**57,84**	**0,00**
4.1.04.16.02.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	5.000.000,00	1.050.000,00	21,00	0,00
4.1.04.16.04.	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	41.000.000,00	25.500.000,00	62,20	0,00
4.1.04.16.06.	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	50.000,00	86.464,00	172,93	0,00
5.	**BELANJA DAERAH**	**46.050.000,00**	**6.000.000,00**	**13,03**	**0,00**
5.1.	**BELANJA OPERASI**	**32.402.300,00**	**6.000.000,00**	**18,52**	**0,00**
5.1.02.	**Belanja Barang dan Jasa**	**32.402.300,00**	**6.000.000,00**	**18,52**	**0,00**
5.1.02.01.	**Belanja Barang**	**13.765.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	13.765.700,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.	**Belanja Jasa**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**100,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.	**Belanja Pemeliharaan**	**6.849.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.849.600,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**5.787.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.787.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	**BELANJA MODAL**	**13.647.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**13.647.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.03.	**Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**	**5.620.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.03.01.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	5.620.700,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.	**Belanja Modal Komputer**	**3.027.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	3.027.000,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM PEMBIAYAAN	**0,00**	**20.636.464,00**	**44,81**	**0,00**

Tanjungpinang, 25 Mei 2025
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

[illegible] HADI,S.Pd.,M.Pd.
196908191998031007

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 3 TANJUNG PINANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**46.050.000,00**	**26.636.464,00**	**57,84**	**0,00**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**46.050.000,00**	**26.636.464,00**	**57,84**	**0,00**
4.1.04.	**Lain-lain PAD yang Sah**	**46.050.000,00**	**26.636.464,00**	**57,84**	**0,00**
4.1.04.16.	**Pendapatan BLUD**	**46.050.000,00**	**26.636.464,00**	**57,84**	**0,00**
4.1.04.16.02.	**Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan**	**5.000.000,00**	**1.050.000,00**	**21,00**	**0,00**
4.1.04.16.02.0001.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	5.000.000,00	1.050.000,00	**21,00**	0,00
4.1.04.16.04.	**Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain**	**41.000.000,00**	**25.500.000,00**	**62,20**	**0,00**
4.1.04.16.04.0001.	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	41.000.000,00	25.500.000,00	**62,20**	0,00
4.1.04.16.06.	**Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah**	**50.000,00**	**86.464,00**	**172,93**	**0,00**
4.1.04.16.06.0001.	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	50.000,00	86.464,00	**172,93**	0,00
5.	**BELANJA DAERAH**	**46.050.000,00**	**6.000.000,00**	**13,03**	**0,00**
5.1.	**BELANJA OPERASI**	**32.402.300,00**	**6.000.000,00**	**18,52**	**0,00**
5.1.02.	**Belanja Barang dan Jasa**	**32.402.300,00**	**6.000.000,00**	**18,52**	**0,00**
5.1.02.01.	**Belanja Barang**	**13.765.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.	**Belanja Barang Pakai Habis**	**13.765.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	178.400,00	0,00	**0,00**	0,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	267.000,00	0,00	**0,00**	0,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.090.800,00	0,00	**0,00**	0,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.113.600,00	0,00	**0,00**	0,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	163.400,00	0,00	**0,00**	0,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.581.500,00	0,00	**0,00**	0,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.523.000,00	0,00	**0,00**	0,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	848.000,00	0,00	**0,00**	0,00
5.1.02.02.	**Belanja Jasa**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**100,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.	**Belanja Jasa Kantor**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**100,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	6.000.000,00	6.000.000,00	**100,00**	0,00
5.1.02.03.	**Belanja Pemeliharaan**	**6.849.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.02.	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**6.849.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.849.600,00	0,00	**0,00**	0,00
5.1.02.04.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**5.787.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**5.787.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	790.000,00	0,00	**0,00**	0,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.997.000,00	0,00	**0,00**	0,00
5.2.	**BELANJA MODAL**	**13.647.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**13.647.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.03.	**Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**	**5.620.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.03.01.	**Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin**	**5.620.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.03.01.0010.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	5.620.700,00	0,00	**0,00**	0,00
5.2.02.05.	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.05.01.	**Belanja Modal Alat Kantor**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00
5.2.02.10.	**Belanja Modal Komputer**	**3.027.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.10.01.	**Belanja Modal Komputer Unit**	**3.027.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	3.027.000,00	0,00	**0,00**	0,00
	SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM PEMBIAYAAN	**0,00**	**20.636.464,00**	**44,81**	**0,00**

Tanjungpinang, 25 Mei 2025

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

[illegible] H. HADI, S.Pd., M.Pd.

19690819199803 1007

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 3 TANJUNG PINANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	**7.5.2.1**	0,00	0,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**7.5.2.2**	0,00	0,00
3	Subtotal (1-2)		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	**7.5.2.3**	20.636.464,00	0,00
5	Subtotal (3+4)		20.636.464,00	0,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	**7.5.2.6**	20.636.464,00	0,00

Tanjungpinang, 25 Mei 2026
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



S. MISTI, HADI,S.Pd.,M.Pd.
19690818199803 1007

PEMERINTAH KOTA KEPULAUAN RIAU

1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SMKN 3 TANJUNG PINANG

NERACA (BLUD)

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
	ASET		**(476.579.456,65)**	**0,00**
	ASET LANCAR		**20.636.464,00**	**0,00**
	Kas dan Setara Kas		**20.636.464,00**	**0,00**
	Kas di BLUD		**20.636.464,00**	**0,00**
	Kas di BLUD		20.636.464,00	0,00
	Persediaan		**0,00**	**0,00**
	Barang Pakai Habis		**0,00**	**0,00**
	Bahan		0,00	0,00
	Suku Cadang		0,00	0,00
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		0,00	0,00
	Obat-obatan		0,00	0,00
	Natura dan Pakan		0,00	0,00
	Jumlah ASET LANCAR		**20.636.464,00**	**0,00**
	ASET TETAP		**(497.215.920,65)**	**0,00**
	Akumulasi Penyusutan		**(497.215.920,65)**	**0,00**
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		**(497.215.920,65)**	**0,00**
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung		(497.215.920,65)	0,00
	Jumlah ASET TETAP		**(497.215.920,65)**	**0,00**
	JUMLAH ASET		**(476.579.456,65)**	**0,00**
	EKUITAS		**(476.579.456,65)**	**0,00**
	EKUITAS		**(476.579.456,65)**	**0,00**
	Ekuitas		**(476.579.456,65)**	**0,00**
	Ekuitas		**(476.579.456,65)**	**0,00**
	Ekuitas		(476.579.456,65)	0,00
	Jumlah EKUITAS		**(476.579.456,65)**	**0,00**
	JUMLAH EKUITAS		**(476.579.456,65)**	**0,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**(476.579.456,65)**	**0,00**

Tanjungpinang, 25 Mei 2026

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

[illegible]

1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 3 TANJUNG PINANG
NERACA (BLUD)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	**ASET**	**1.1.**	**(476.579.456,65)**	**0,00**
2	**ASET LANCAR**	**1.1.1.**	**20.636.464,00**	**0,00**
3	Kas di Bendahara Penerimaan	1.1.1.00.	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.1.1.01.	0,00	0,00
5	Kas di BLUD	1.1.1.02.	20.636.464,00	0,00
6	Kas Dana BOS	1.1.1.03.	0,00	0,00
7	Kas Dana P2SP	1.1.1.04.	0,00	0,00
8	Kas Lainnya Setara Kas	1.1.1.05.	0,00	0,00
9	Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum	1.1.1.06.	0,00	0,00
10	Piutang Pajak	1.1.1.07.	0,00	0,00
11	Piutang Retribusi	1.1.1.08.	0,00	0,00
12	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.08.	0,00	0,00
13	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.09.	0,00	0,00
14	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.1.10.	0,00	0,00
15	Belanja dibayar dimuka	1.1.1.11.	0,00	0,00
16	Piutang Lainnya	1.1.1.12.	0,00	0,00
17	Persediaan Badan Layanan Umum	1.1.1.13.	0,00	0,00
18	Aset Untuk Dikonsolidasikan	1.1.1.14.	0,00	0,00
	Jumlah ASET LANCAR		20.636.464,00	0,00
19	**ASET TETAP**	**1.1.2.**	**(497.215.920,65)**	**0,00**
20	Tanah	1.1.2.01.	0,00	0,00
21	Peralatan dan Mesin	1.1.2.02.	0,00	0,00
22	Gedung dan Bangunan	1.1.2.03.	0,00	0,00
23	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.1.2.04.	0,00	0,00
24	Aset Tetap Lainnya	1.1.2.05.	0,00	0,00
25	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.1.2.06.	0,00	0,00
26	Akumulasi Penyusutan	1.1.2.07.	(497.215.920,65)	0,00
	Jumlah ASET TETAP		(497.215.920,65)	0,00
27	**PIUTANG JANGKA PANJANG**	**1.1.3.**	**0,00**	**0,00**
28	Tagihan Penjualan Angsuran	1.1.3.01.	0,00	0,00
29	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	1.1.3.02.	0,00	0,00
30	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.3.03.	0,00	0,00
	Jumlah PIUTANG JANGKA PANJANG		0,00	0,00
31	**ASET LAINNYA**	**1.1.4.**	**0,00**	**0,00**
32	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.1.4.01.	0,00	0,00
33	Dana Kelolaan	1.1.4.02.	0,00	0,00
34	Aset yang dibatasi Penggunaannya	1.1.4.03.	0,00	0,00
35	Aset Tak Berwujud	1.1.4.04.	0,00	0,00
36	Aset Lain – Lain	1.1.4.05.	0,00	0,00
37	Akumulasi Amortisasi	1.1.4.06.	0,00	0,00
	Jumlah ASET LAINNYA		0,00	0,00
	JUMLAH ASET		(476.579.456,65)	0,00

38	**KEWAJIBAN**	**1.2.**	**0,00**	**0,00**
39	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**1.2.1.**	**0,00**	**0,00**
40	Utang Usaha	1.2.1.01.	0,00	0,00
41	Utang Pihak Ketiga	1.2.1.02.	0,00	0,00
42	Utang Pajak	1.2.1.03.	0,00	0,00
43	Utang Kepada KUN	1.2.1.04.	0,00	0,00
44	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.2.1.05.	0,00	0,00
45	Belanja yang masih harus dibayar	1.2.1.06.	0,00	0,00
46	Pendapatan Diterima Dimuka	1.2.1.07.	0,00	0,00
47	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.2.1.08.	0,00	0,00
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0,00	0,00
48	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**1.2.2.**	**0,00**	**0,00**
49	Utang Jangka Panjang	1.2.2.01.	0,00	0,00
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		0,00	0,00
50	**EKUITAS**	**1.3.**	**(476.579.456,65)**	**0,00**
51	**EKUITAS**	**1.3.1.**	**(476.579.456,65)**	**0,00**
52	Ekuitas	1.3.1.01.	(476.579.456,65)	0,00
	Jumlah EKUITAS		(476.579.456,65)	0,00
	JUMLAH EKUITAS		(476.579.456,65)	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		(476.579.456,65)	0,00

Tanjungpinang, 25 Mei 2026

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

SAMSUL HADI, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19690819199003 1007

PEMERINTAH KOTA KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 3 TANJUNG PINANG
LAPORAN OPERASIONAL (BLUD)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN – LO	**26.636.464,00**	**0,00**	**26.636.464,00**	**100,00**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**26.636.464,00**	**0,00**	**26.636.464,00**	**100,00**
	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	**26.636.464,00**	**0,00**	**26.636.464,00**	**100,00**
	Pendapatan dari BLUD-LO	**26.636.464,00**	**0,00**	**26.636.464,00**	**100,00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	**1.050.000,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**100,00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	**25.500.000,00**	**0,00**	**25.500.000,00**	**100,00**
	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	100,00
	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	**86.464,00**	**0,00**	**86.464,00**	**100,00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro-LO	86.464,00	0,00	86.464,00	100,00
	Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**26.636.464,00**	**0,00**	**26.636.464,00**	**100,00**
	JUMLAH PENDAPATAN – LO	**26.636.464,00**	**0,00**	**26.636.464,00**	**100,00**
	BEBAN DAERAH	**503.215.920,65**	**0,00**	**503.215.920,65**	**100,00**
	BEBAN OPERASI	**503.215.920,65**	**0,00**	**503.215.920,65**	**100,00**
	Beban Barang dan Jasa	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**100,00**
	Beban Jasa	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**100,00**
	Beban Jasa Kantor	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**100,00**
	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	**497.215.920,65**	**0,00**	**497.215.920,65**	**100,00**
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	**497.215.920,65**	**0,00**	**497.215.920,65**	**100,00**
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	**497.215.920,65**	**0,00**	**497.215.920,65**	**100,00**
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	497.215.920,65	0,00	497.215.920,65	100,00
	Jumlah BEBAN OPERASI	**503.215.920,65**	**0,00**	**503.215.920,65**	**100,00**
	JUMLAH BEBAN DAERAH	**503.215.920,65**	**0,00**	**503.215.920,65**	**100,00**
	SURPLUS/ DEFISIT	**(476.579.456,65)**	**0,00**	**(476.579.456,65)**	**100,00**

Tanjungpinang, 25 Mei 2025
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



SAMSUL HADI,S.Pd.,M.Pd.
19690819199803 1007

PEMERINTAH KOTA KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 3 TANJUNG PINANG
LAPORAN OPERASIONAL (BLUD)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	**PENDAPATAN**				
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00	0,00	#NUM!
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	100,00
5	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	#NUM!
6	Pendapatan Usaha Lainnya	86.464,00	0,00	86.464,00	100,00
7	Pendapatan APBN/ APBD	0,00	0,00	0,00	#NUM!
	Jumlah PENDAPATAN	**26.636.464,00**	**0,00**	26.636.464,00	100,00
8	**BEBAN**				
9	Beban Pegawai	0,00	0,00	0,00	#NUM!
10	Beban Persediaan	0,00	0,00	0,00	#NUM!
11	Beban Jasa	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
12	Beban Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	#NUM!
13	Beban Langganan Daya dan Jasa	0,00	0,00	0,00	#NUM!
14	Beban Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	#NUM!
15	Beban Penyusutan Aset	497.215.920,65	0,00	497.215.920,65	100,00
16	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	#NUM!
	Jumlah BEBAN	**503.215.920,65**	**0,00**	503.215.920,65	100,00
	Surplus/Defisit Operasional	**(476.579.456,65)**	**0,00**	(476.579.456,65)	100,00
17	**KEGIATAN NON OPERASIONAL**				
18	Surplus/ Defisit Penjualan Aset Nonlancar	0,00	0,00	0,00	#NUM!
19	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	0,00	0,00	0,00	#NUM!
20	Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	#NUM!
	Jumlah Surplus/Defisit Dari KEGIATAN NON OPERASIONAL	**0,00**	**0,00**	0,00	#NUM!
	Surplus/Defisit Sebelum POS LUAR BIASA	**(476.579.456,65)**	**0,00**	(476.579.456,65)	100,00
21	**POS LUAR BIASA**				
22	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	#NUM!
23	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	#NUM!
	Jumlah POS LUAR BIASA	**0,00**	**0,00**	0,00	#NUM!
	Surplus/Defisit-LO	**(476.579.456,65)**	**0,00**	(476.579.456,65)	100,00

Tanjungpinang, 25 Mei 2025
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

SAMSUL HADI, S.Pd., M.Pd.
19690819199803 1007

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 3 TANJUNG PINANG
LAPORAN ARUS KAS (BLUD)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	**Arus Masuk Kas**		
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	1.050.000,00	0,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	25.500.000,00	0,00
6	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
7	Pendapatan APBN/APBD	0,00	0,00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	86.464,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	26.636.464,00	0,00
9	**Arus Keluar Kas**		
10	Pembayaran Pegawai	0,00	0,00
11	Pembayaran Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00
12	Pembayaran Pemeliharaan	0,00	0,00
13	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	0,00	0,00
14	Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	0,00
15	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	6.000.000,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi	20.636.464,00	0,00
16	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
17	**Arus Masuk Kas**		
18	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
19	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
20	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
21	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
22	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
23	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
24	Penerimaan dari Divestasi	0,00	0,00
25	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
26	**Arus Keluar Kas**		
27	Perolehan Tanah	0,00	0,00
28	Perolehan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
29	Perolehan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
30	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
31	Perolehan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
32	Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
33	Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00
34	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi	0,00	0,00

35	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**		
36	**Arus Masuk Kas**		
37	Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00
38	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
39	**Arus Keluar Kas**		
40	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00
41	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00
42	Penyetoran ke Kas Negara	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
43	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**		
44	**Arus Masuk Kas**		
45	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
46	**Arus Keluar Kas**		
47	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
48	**Kenaikan/ Penurunan Kas BLU**	20.636.464,00	0,00
49	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLU**	0,00	0,00
50	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU**	20.636.464,00	0,00

Tanjungpinang, 25 Mei 2025

Mengetahui

Ketua Tim Penggurus Anggaran

[illegible] I, S.Pd.,M.Pd.

[illegible]

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 3 TANJUNG PINANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (BLUD)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Ekuitas Awal		0,00	0,00
2	Surplus/Defisit-LO		(476.579.456,65)	0,00
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		0,00	0,00
4	Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
6	Lain-lain		0,00	0,00
7	Ekuitas Akhir		**(476.579.456,65)**	**0,00**

Tanjungpinang, 25 Mei 2026

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



SAMSUL HADI,S.Pd.,M.Pd.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan Keuangan BLUD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran ;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan BLUD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala BLUD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang

dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan BLUD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SMK Negeri 3 Tanjungpinang Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan RiauTahun 2025.

17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 58 Tahun 2025 Tentang Tata Cara KerjaSama Dengan Pihak Lain Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang Tahun 2025, adalah tanggungjawab sepenuhnya BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang, dalam hal ini adalah Pimpinan BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang

1.4 Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (*Subsequent Event*) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang tahun 2026. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2026.

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang
- 1.4 Periode Pelaporan Keuangan
- 1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Profil BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang
- 2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang
- 2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang tahun 2025

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Asumsi dasar Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja
4.7 Kebijakan Akuntansi Kas
4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan
4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

5.1 Laporan Realisasi Anggaran
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3 Neraca
5.4 Laporan Operasional
5.5 Laporan Arus Kas
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
5.7 Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

Bab VII Penutup

BAB II

PROFIL BLUD SMK NEGERI 3 TANJUNGPINANG

2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang

2.1.1 Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Data Tenaga Pendidik SMKN 3 Tanjungpinang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	TENAGA PENDIDIK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN			JUMLAH
		S-1	S-2	S-3	
1	Kelompok A (Wajib)	28	0	1	29
2	Kelompok B (Wajib)	5	0	0	5
3	Kelompok C (Peminatan) C1-Dasar Bidang Keahlian	7	0	0	7
4	Bimbingan Konseling (BK)	5	0	0	5
5	C2 - Dasar Program Keahlian & C3-Kompetensi Keahlian				
5.1	Teknik Konstruksi dan Properti	3	1	0	4
5.2	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	3	0	0	3
5.3	Teknik elektronika	9	0	0	9
5.4	Teknik Ketenagalistrikan	9	0	0	9
5.5	Teknik Pemesinan	6	1	0	7
5.6	Teknik Pengelasan Fabrikasi Logam	4	0	0	4
5.7	Teknik kendaraan Ringan	7	0	1	8
J U M L A H		**37**	**2**	**2**	**41**

Data Tenaga Kependidikan SMKN 3 Tanjungpinang Tahun 2025 sebagai berikut :

NO	TENAGA KEPENDIDIKAN	PNS	NON PNS	JML
1	Kepala Tata Usaha	1	0	1
2	Tenaga teknis keuangan	1	1	2
3	Tenaga peustakaan	0	1	1
6	Tenaga Kebersihan	0	5	5
7	Tenaga administrasi lainnya	4	22	26
8	Security	0	8	8
	Jumlah Tenaga Kependidikan	**7**	**37**	**44**

2.1.2 Data Peserta Didik

Data Peserta didik SMKN 3 Tanjungpinang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN	KELAS			TOTAL SISWA PER PROGRAM
			10	11	12	
1	Teknik Konstruksi dan Bangunan	Teknik Konstruksi dan Perumahan	30	17	11	**58**
2	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	32	27	34	**93**
3	Teknik Elektronika	Elektronika industri	35	29	18	**82**
		Mekatronika	33	18	0	**51**
		Otomasi Industri	32	27	29	**88**
4	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	87	61	57	**205**
5	Teknik Pemesinan	Teknik Pemesinan	66	57	59	**182**
6	Teknik Pengelasan	Teknik Pengelasan	36	32	31	**99**
7	Teknik Kendaraan Ringan	Teknik Kendaraan Ringan	63	36	30	**129**
		Teknik Sepeda Motor	29	34	31	**94**
8	**TOTAL**					**1081**

2.1.3 Sarana Prasarana

Adapun Kelengkapan Sarana dan prasarana yang dimiliki SMKN 3 Tanjungpinang dikelompokkan dalam ruang pembelajaran umum, ruang penunjang dan ruang pembelajaran khusus.

1) Ruang Pembelajaran Umum ;
   - Ruang Kelas : 22 ruang
   - Ruang Perpustakaan : 1 ruang
   - Ruang Laboratorium Komputer : 3 ruang
2) Ruang Penunjang ;
   - Ruang Pimpinan : 1 ruang
   - Ruang Guru : 2 ruang
   - Ruang Rapat : 1 ruang

- Ruang Tata Usaha : 1 ruang
- Tempat Beribadah : 1 ruang
- Ruang Konseling : 1 ruang
- Ruang UKS : 2 ruang
- Ruang OSIS : 1 ruang
- Jamban : 13 ruang
- Gudang : 4 ruang
- Tempat bermain / berolahraga : 4 ruang

3) Ruang Pembelajaran Khusus ;

- Ruang Praktek TKP : 3 ruang
- Ruang Praktek DPIB : 4 ruang
- Ruang Praktek TEI : 8 ruang
- Ruang Praktek TITL : 1 ruang
- Ruang Praktek PM : 5 ruang
- Ruang Praktek TLAS : 3 ruang
- Ruang Praktek TKR : 4 ruang
- Ruang Praktek TSM : 2 ruang

Adapun infrastruktur yang dimiliki SMK Negeri 3 Tanjungpinang :

1) Sumber Listrik : PLN
2) Listrik : 150.000 Watt
3) Akses Internet : Telkom, Bandwidth 50 mbps/100mbps
4) Sumber air bersih : PDAM – Sumur Bor

BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang 103 memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten serta tenaga ahli yang mendukung pelaksanaan *Teaching Factory (TEFA)*. SDM yang tersedia meliputi:

1. Tenaga Pendidik (Guru Produktif dan Normatif):
   - Guru bersertifikasi keahlian industri sesuai bidang kompetensi.
   - Guru mata pelajaran umum yang mendukung kurikulum berbasis kompetensi.
   - Instruktur dari dunia industri yang terlibat dalam program pelatihan siswa.
2. Tenaga Kependidikan:
   - Staf administrasi yang mengelola keuangan dan operasional BLUD.
   - Teknisi laboratorium dan bengkel untuk mendukung kegiatan praktik.
   - Tenaga keamanan dan kebersihan untuk menjaga lingkungan sekolah yang kondusif.
3. Kemitraan dengan Industri:
   - Mengundang praktisi industri sebagai instruktur tamu.

- Menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk program magang dan penyerapan tenaga kerja.
- Mengembangkan skema sertifikasi kompetensi yang diakui dunia usaha dan industri.

Sebagai SMK BLUD yang berbasis *Teaching Factory* (TEFA) dan Unit Produksi (UP), sekolah telah memiliki berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran berbasis produksi dan layanan industri, di antaranya:

1. Ruang Kelas dan Laboratorium:
   - Ruang kelas berbasis IT untuk pembelajaran teori.
   - Laboratorium komputer untuk simulasi bisnis digital dan desain grafis.
   - Peustakaan digital sebagai pusat referensi dan literasi siswa.
2. Workshop dan Bengkel TEFA / UP:
   - Bengkel otomotif dengan peralatan servis kendaraan standar industri.
   - Dapur produksi kuliner yang dilengkapi dengan peralatan skala industri.
   - Studio desain dan multimedia untuk produksi konten digital dan video.
   - Workshop teknik bangunan untuk pelatihan konstruksi dan produksi material.
3. Fasilitas Pendukung:
   - Asrama atau tempat tinggal bagi siswa yang berasal dari luar daerah.
   - Ruang pemasaran produk hasil Teaching Factory.
   - Area publik seperti kantin dan koperasi sekolah yang dikelola oleh siswa.

Sebagai BLUD, SMK memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan Teaching Factory. Sumber dana sekolah berasal dari:

1. Dana BOS dan APBD:
   - Digunakan untuk operasional sekolah, gaji guru, serta pengadaan bahan ajar dan alat praktik.
2. Pendapatan dari Unit Usaha TEFA:
   - Hasil penjualan produk dari unit Teaching Factory.
   - Jasa layanan seperti servis otomotif, desain grafis, atau catering.
   - Kerjasama dengan industri dalam proyek tertentu.
3. Bantuan dari Pemerintah dan Swasta:
   - Hibah atau bantuan dari pemerintah untuk pengembangan kurikulum dan fasilitas.
   - Sponsor dari perusahaan yang mendukung pengembangan Teaching Factory.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang

Konsep strategi tidak hanya mempunyai nilai yang amat berharga bagi organisasi yang mengejar keuntungan, tapi juga bagi organisasi pemerintah atau publik. Terlebih organisasi pemerintah dalam membuat keputusan-keputusan penting yang selalu dituntut untuk *strategically effective* (Koteen dalam Salusu, 2006:39). Karakteristik yang unik dari organisasi pemerintah justru menunjukkan kebutuhan yang semakin besar terhadap pemanfaatan manajemen dan perencanaan strategi. Perencanaan strategi dapat menolong organisasi pemerintah untuk menangani perubahan lingkungan yang signifikan. Selain itu, dengan meningkatkan kemampuan untuk beikir dan bertindak strategi, organisasi pemerintah dapat memberikan pelayanan terhadap kesejahteraan umum dengan efektif.

SMKN 3 Tanjungpinang adalah UPT-Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (menuju PPK-BLUD) dalam bidang layanan Pendidikan merupakan organisasi Pemerintah dimana dalam setiap kegiatannya dituntut bertindak strategis dalam memberikan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat.

2.2.1 Analisis SWOT

Analisis atas tantangan yang dihadapi dan peluang bagi pengembangan layanan Pendidikan di SMK Negeri 3 Tanjungpinang memerlukan analisis atas kondisi internal dan eksternal. Untuk itu diperlukan analisis atas kekuatan (*Strength*), kelemahan(*Weakness*), peluang (*Opportunity*), tantangan (*Threat*), atau analisis SWOT atas kondisi pendidikan di SMK Negeri 3 Tanjungpinang yang pada dasarnya merupakan gambaran tentang kinerja layanan SMK Negeri 3 Tanjungpinang.

Faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan (*Strength*) dalam upaya pengembangan layanan di SMK Negeri 3 Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya pendanaan yang besar untuk pengembangan program-program layanan pendidikan beserta realisasinya, sejalan dengan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengalokasikan 20% dari APBD, ditambah dengan pendanaan yang besar pula bersumber dari APBN;
2. Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh SMK Negeri 3 Tanjungpinang sangat memadai, dengan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan untuk menjalankan pekerjaan berdasarkan tupoksi organisasi, dilengkapi dengan kualifikasi akademik dan keterampilan yang sesuai bagi upaya pengembangan layanan pendidikan;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sebagai faktor pendukung bagi pengembangan program-program layanan pendidikan.
4. Tersedianya sarana pembelajaran berbasis produk (barang/jasa) melalui *Teaching Factory* pada semua kompetensi keahlian untuk menghasilkan tamatan yang kompeten sesuai kebutuhan industri.
5. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan organisasi yang mampu menciptakan budaya kerja yang produktif dan iklim organisasi yang kondusif di lingkungan SMK Negeri 3 Tanjungpinang;
6. Penguasaan dan penerapan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang mampu meningkatkan produktivitas sumber daya manusia di lingkungan SMK Negeri 3 Tanjungpinang.

Faktor-faktor internal yang menjadi kelemahan *(weakness)* dalam upaya pengembangan layanan pendidikan di SMK Negeri 3 Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Pemerataan penempatan dan alokasi sumberdaya manusia pada berbagai Kompetensi keahlian masih kurang karena tidak ada penerimaan pegawai negeri sipil dan masih menghandalkan pendidik honorer atau pendidik tidak tetap, mengakibatkan adanya perbedaan produktivitas dan hasil kerja pada masing-masing kompetensi keahlian di lingkungan SMK Negeri 3 Tanjungpinang.
2. Intensitas komunikasi dan kerjasama antar kompetensi keahlian masih memerlukan peningkatan terutama terkait dengan implementasi program sekolah yang pelaksanaannya membutuhkan kerjasama dan kebersamaan antar kompetensi keahlian;
3. Pengembangan program kerja tahunan masih belum mengacu pada perencanaan strategis jangka menengah, mengakibatkan kontinuitas dan keberlanjutan program dari tahun ke

tahun sesuai dengan rencana jangka menengah kurang tercapai dan mampu mengantisipasi perkembangan yang berlangsung di masyarakat;

4. Pada beberapa implementasi program masih dijumpai kurangnya kejelasan dan ketegasan dalam pelimpahan wewenang dari tingkat pimpinan kepada bawahan, serta kekurangsesuaian penunjukan bidang atau sub bagian untuk melaksanakan program-program kerja yang dilaksanakan;
5. Masih ada ruang yang lokasi ruangnya satu dengan yang lain berjauhan, yaitu Ruang Tenaga Pendidik dilantai 1 dan tenaga Kependidikan (Tendik). Kondisi ini tentu beengaruh pada efektivitas koordinasi dan pemberian layanan kepada tenaga pendidik dan kependidikan di SMK Negeri 3 Tanjungpinang.

Faktor-faktor eksternal yang merupakan peluang (*opportunity*) dalam upaya pengembangan layanan pendidikan di SMK Negeri 3 Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Makin meningkatnya kebutuhan, kesadaran dan perhatian masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai faktor penentu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan harapan untuk meraih keberhasilan di masa depan;
2. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kota Tanjungpinang, serta perkembangan sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat, menumbuhkembangkan kebutuhan akan sumberdaya manusia dengan pengetahuan dan keterampilan yang beragam, dan pada gilirannya meningkatkan perluasan kebutuhan akan jasa layanan pendidikan;
3. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan, sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan akan pendidikan di kalangan masyarakat. Lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat makin meningkat keberagaman maupun kualitasnya;
4. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak yang positif bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan dan pelaksaaan pendidikan di SMK Negeri 3 Tanjungpinang . Berbagai riset dalam bidang pendidikan telah membawa peningkatan kualitas pendidikan melalui temuan-temuan inovatif dalam praktek pembelajaran. Selain itu pemanfaatan teknologi dalam praktek pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Faktor-faktor eksternal yang merupakan tantangan (*threat*) dalam upaya pengembangan layanan pendidikan di SMK Negeri 3 Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan kebutuhan masyarakat atas layanan pendidikan baik dari sisi kuantitas dan kualitas yang makin meningkat, serta makin meningkatnya sikap kritis masyarakat atas berbagai kebijakan dan implementasi program-program pendidikan, memerlukan kepekaan untuk memahami dinamika perkembangan;
2. Arah kebijakan yang kurang menentu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengakibatkan banyak perubahan keputusan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, dan pengembangan serta implementasi program yang terkesan kurang mengacu pada perencanaan jangka menengah dan bersifat parsial kurang memiliki keterkaitan yang komprehensif dengan visi dan misi yang telah dikembangkan. Hal ini memerlukan fleksibilitas dan tanggapan yang cepat untuk memvasilitasi pelaksanaannya di SMK Negeri 3 Tanjungpinang, dan seringkali menganggu kontinyuitas implementasi program dan

pelaksanaan kerjayang dikembangkan di SMK Negeri 3 Tanjungpinang.

Analisis SWOT yang terlihat di atas, memberikan alternatif strategi yang tepat bagi SMKN 3 Tanjungpinang. Analisis tersebut memperlihatkan gambaran strategi menyeluruh bagi SMKN 3 Tanjungpinang yang didasarkan pada kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Dengan demikian, dapat disusun rumusan strategi SMKN 3 Tanjungpinang yang dapat dilakukan.

2.2.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan Kepulauan Riau tahun 2021-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan di Kabupaten/Kota, berkaitan dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang menjadi penjabaran visi dan misi pembangunan di Kepulauan Riau terhadap sasaran-sasaran yang dimaksud telah dirumuskan pada naskah JMD Kepulauan Riau 2021-2026, menunjukkan adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan. Kebutuhan tersebut mencakup sarana dan prasarana pendidikan,pendidik dan tenaga kependidikan, pendanaan, dan tata kelola.

Seperti telah diungkapkan dalam JMD Kepulauan Riau 2022-2026 Tabel V.1, seperti yang tercantum dalam BAB III Renstra, terdapat 3 (tiga) sasaran pembangunan pendidikan di Kepulauan Riau. Ketiga sasaran pembangunan pendidikan tersebut dijabarkan dari rumusan misi pembangunan pertama, yaitu: Meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan aksesibilitas pendidikan menengah atas 2. Peningkatan mutu pendidikan 3. Peningkatan kualitas keterampilan dan profesionalisme tenaga kerja/pencari kerja melalui sertifikasi profes. Dan berdasarkan 7 (tujuh) arah kebijakan pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, maka SMKN 3 Tanjungpinang menentukan arah strategi dan kebijakannya periode 2024 – 2028 sebagai berikut :

Arah strategi yang dilakukan SMKN 3 Tanjungpinang :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Meningkatkan kuantitas tamatan yang mempunyai daya saing diDU/DI;
3. Meningkatkan kompetensi keahlian siswa yang mampu menjadi tenaga kerja trampil siap kerja, berwirausaha, ataupun melanjutkan ke jenjang lebih tinggi
4. Meningkatkan potensi sekolah yang bernuansa industri melalui *Teaching Factory* pada semua kompetensi keahlian sebagai saranapembelajaran berbasis produk (barang/jasa) untuk menghasilkantamatan yang kompeten sesuai kebutuhan industri;
5. Meningkatkan fungsi sekolah sebagai Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kejuruan Teadu (PPKT) kepada masyarakat;
6. Meningkatkan fungsi sekolah sebagai Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kejuruan Teadu (PPKT) kepada masyarakat;
7. Meningkatkan Kualitas Lingkungan yang aman, nyaman, indah dan kondusif;
8. Perluasan dan pemerataan akses Pendidikan menengah bermutu yang bekesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/dunia industri;
9. Penguatan pengelolaan sistem manajemen dalam pengawasan internal;
10. Pengembangan jiwa kewirausahaan melalui unit produksi yang ada di sekolah sesuai dengan kompetensi keahlian masing- masing.

Sedangkan arah kebijakan SMKN 3 Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah Kompetensi keahlian sebagai upayapenyediaan tenaga kerja;
2. Meningkatkan jumlah ruang pembelajaran umum sebagai upayapenambahan kompetensi keahlian;
3. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik untuk menghasilkan tamatanyang kompeten;
4. Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan sebagai upaya pelayananpada tenaga pendidik dan siswa;
5. Meningktakan keterserapan tamatan di DU/DI;
6. Meningkatkan kompetensi keahlian siswa melalui uji LSP;
7. Meningkatkan Jumlah siswa yang berwirausaha;
8. Meningkatkan kompetensi siswa untuk melanjutkan ke jenjang yanglebih tinggi melalui pendampingan BK;
9. Meningkatkan Jumlah kompetensi keahlian yang pembelajaran berwirausahanya melalui teaching factory;
10. Meningkatkan Jumlah fasilitas ruang pelatihan yg dimanfaatkan olehmasyarakat.
11. Meningkatkan Jumlah kegiatan pelatihan bagi masyarakat.

2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang

Tabel Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang

No	Unit Teaching Factory (TEFA)	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Keterangan
1	**TEFA TKP**	-	-	-		Belum ada kegiatan
2	**TEFA DPIB**	-	-	-		Belum ada kegiatan
3	**TEFA Eletronika Industri**	-	-	-		Belum ada kegiatan
4	**TEFA Mekatronika**	-	-	-		Belum ada kegiatan
5	**TEFA Otomasi Industri**	-	-	-		Belum ada kegiatan
6	**TEFA Pemesinan**	Pembuatan Roda Gigi Alat Pengaduk	5.000.000	1.050.000		
7	**TEFA Pengelasan**	-	-	-		Belum ada kegiatan
8	**TEFA Kendaraan ringan**	-	-	-		Belum ada kegiatan
9	**TEFA Sepeda Motor**	-	-	-		Belum ada kegiatan
10	**TEFA Instalasi Tenaga Listrik**	-	-	-		Belum ada kegiatan

BAB III
INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025

Realisasi Pencapaian Target Pendapatan Tahun Anggaran 2025 BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang Merealisasikan Pendapatan Hasil Kerjasama 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) dengan capaian target 13,02% dan Hibah Terikat Pendidikan Sebesar 4.936.000.000,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) dengan capain target 100% dari Target Pendapatan Jasa Layanan dan Jasa Kerjasama sebesar 46.050.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Pendapatan Hibah Terikat sebesar 4.936.000.000,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).

3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi.

- Terbatasnya sumber pendapatan
- Tingkat partisipasi masyarakat masih rendah
- Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur
- Kurangnya keterampilan Pemasaran dan Promosi
- Kendala Regulasi dan Kebijakan
- Ketergantungan pada dana BOS dan Subsidi
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Memadai
- Persaingan dengan Lembaga Pendidikan Lain
- Fluktuasi jumlah siswa
- Manajemen keuangan yang kurang efektif

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Akuntansi adalah BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

b. Asumsi kemandirian entitas;
c. Asumsi kesinambungan entitas; dan
d. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau adalah:

a) ***Basis Kas*** untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam ***Laporan Realisasi Anggaran***
Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat Kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

b) ***Basis akrual*** untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam ***Neraca***
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan beengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

c) ***Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran*** berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riautidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

d) ***Basis akrual untuk neraca*** berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan beengaruh pada keuangan BLUD, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas;

4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengakuan dan pengukuran atas transaksi kejadian ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan ini adalah:

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.
   Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD , adalah sebagai berikut:
   a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;

b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang tahun 2025, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat Diterima pada Rekening Kas Umum. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum untuk seluruh transaksi setelah dilakukan pengesahan definitif bendahara. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

4.7 Kebijakan Akuntansi Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas secara umum diakui jika memenuhi kriteria:

a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.

4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari:

- Barang Konsumsi;
- Bahan untuk pemeliharaan;
- Suku cadang;
- Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
- Bahan baku;
- Barang dalam proses/setengah jadi;

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal; diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya beindah.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.

4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.

4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

BAB V RINCIAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang telah disusun BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan – LRA

Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang mencatat realisasi pendapatan sebesar 26,636,464.00 atau sebesar 2.56% dari target yang ditetapkan sebesar 46,050,000.00 sebagaimana ikhtisar sebagai berikut:

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	5,000,000.00	1,050,000.00	0.21	1,050,000.00
Pendapatan BLUD dari Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	41,000,000.00	25,500,000.00	0.62	25,500,000.00
Pendapatan BLUD dari APBD	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	50,000.00	86,464.00	1.73	86,464.00
TOTAL PENDAPATAN BLUD	46,050,000.00	26,636,464.00	2.56	26,636,464.00

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Tahun 2025 sebesar 1.050.000,00 atau 21,00 % dari anggaran yang ditargetkan sebesar 5.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Pendapatan TEFA	5000000.00	1050000.00	0,21	1050000.00
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	5000000.00	1050000.00	0,21	1050000.00

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah Tahun 2025 sebesar 4.936.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar 4.936.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Hibah Kementerian	4.936.000.000,00	4.936.000.000,00	100	4.936.000.000,00
Total Pendapatan BLUD dari Hibah	4.936.000.000,00	4.936.000.000,00	100	4.936.000.000,00

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Tahun 2025 sebesar 25.500.000,00 atau 62,20% dari anggaran yang ditargetkan sebesar 41.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Pendapatan Sewa Aula 6 Mei 2025	7.500.000,00	7.500.000,00	100	7.500.000,00
Kantin Sekolah 11 Juli 2025	18.000.000,00	18.000.000,00	100	18.000.000,00
Pendapatan Kegiatan Pelatihan	15.500.000	0,00	0,00	0,00
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	41.000.000,00	25.500.000,00	62,20	25.500.000,00

iv) Pendapatan BLUD dari APBD/APBN

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD/APBN Tahun 2025 sebesar 0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Dana BOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana BOSDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pendapatan BLUD dari APBD	0,00	0,00	0,00	0,00

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp 86.464,00 atau 1,73 % dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 50.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Pendapatan Blud dari jasa giro	50.000,00	86.464,00	1,73	86.464,00
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	50.000,00	86.464,00	1,73	86.464,00

b. Belanja

1. Belanja Pegawai BLUD

Berupa Belanja Gaji & Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan BLUD dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % dari total anggaran belanja pegawai BLUD yang sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp 6.000.000,00 atau 18,52% dari total anggaran belanja barang dan jasa yang sebesar Rp 32.402.300,00 dengan rincian sebagai berikut :.

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Barang	13.402.300,00	0,00	0,00
Belanja Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan	6.849.600,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	5.787.000,00	0,00	0,00
Total Belanja Barang dan Jasa BLUD	32.402.300,00	6.000.000,00	18,52

3. Belanja Modal BLUD

Belanja modal BLUD terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp 0,00 atau Rp 0,00% dari total anggaran belanja modal peralatan dan mesin yang sebesar Rp 13.647.700,00, belanja modal gedung dan bangunan yang terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari total anggaran belanja modal gedung dan bangunan yang sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.647.700,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Modal BLUD	13.647.700,00	0,00	0,00	0,00

5.2 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo awal SAL pada tahun 2025 sebesar Rp 0,00 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

2) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan digunakan dalam rangka membiayai defisit tahun anggaran berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 0,00 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

3) Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SiLPA tahun 2025 sebesar Rp 0,00

5.3 Neraca

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- Berupa kas/setara kas dan persediaan

Aset Lancar sebesar Rp 20.636.464,00 yang dimiliki BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang per 31 Desember 2025 terdiri dari:

a. Kas di Bendahara BLUD

Kas BLUD adalah semua bentuk penerimaan dan pengeluaran uang tunai atau setara kas yang dikelola oleh SMK Negeri 3 Tanjungpinang dalam rangka menjalankan operasionalnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, dan pendapatan lainnya. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp 20.636.464,00 dengan rincian :

Uraian	Jumlah
Kas di Bank	
Rek Bank Riau Kepri No Rek 1.030.100.100	20.636.464,00
Rek Bank Mandiri	0,00
Kas Tunai	0,00
Total Kas di Bendahara BLUD	20.636.464,00

b. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan kas dibawah pengelolaan bendahara BOS yang bersumber dari pemerintah untuk mendukung operasional sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan tanpa membebani peserta didik. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp 0,00 dengan rincian :

Uraian	Jumlah
Kas di Bank	
Rek Bank Riau Kepri No Rek 103.38.00385	0,00
Rek Bank	0,00
Kas Tunai	0,00
Total Kas di Bendahara BOS	0,00

c. Kas di Bendahara Bantuan Pemerintah (Sekolah Pusat Keunggulan)

Kas di Bendahara Bantuan Pemerintah merupakan kas dibawah pengelolaan bendahara Bantuan Pemerintah yang bersumber dari pemerintah pusat untuk mendukung operasional sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan sekolah pusat keunggulan. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara Sekolah Pusat Keunggulan sebesar Rp 0,00 dengan rincian :

Uraian	Jumlah
Kas di Bank	
Rek Bank Mandiri No Rek 900.00.6070502.8	0,00
Rek Bank Mandiri	0,00
Kas Tunai	0,00
Total Kas di Bendahara Sekolah PK	0,00

d. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 terdiri dari :

Uraian	Jumlah
Persediaan Barang Habis Pakai	
- Bahan	0,00
- Suku Cadang	0,00
Total Persediaan	0,00

2. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh pelayanan umum. Aset tetap sebesar Rp 3.892.384.079,35 per 31 Desember 2025 merupakan nilai perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan yang pengadaannya bersumber dari pengelolaan dana BOS dan dana SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dan BLUD.

a. Tanah

Nilai aset tanah BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 64.397.300,00 dan tidak terdapat penambahan aset tetap tanah selama tahun 2025.

b. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 meningkat sebesar 0,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp 0,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**0,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Tahun 2025	0,00
- Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kementerian Pusat Tahun 2025	0,00
Total Penambahan	0,00
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Tahun 2025	0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel tahun 2025	0,00
Total Pengurangan :	0,00
Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**0,00**

c. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 meningkat sebesar Rp 0,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang sebesar 0,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**0,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Tahun 2025	0,00
- Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kementerian Pusat Tahun 2025	0,00

Uraian	Jumlah
Total Penambahan	**0,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Tahun 2025	0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel Tahun 2025	0,00
Total Pengurangan :	
Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**0,00**

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 meningkat sebesar Rp 0,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp 0,00. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**0,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Tahun 2025	0,00
- Hibah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kementerian Pusat Tahun 2025	0,00
Total Penambahan	**0,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Tahun 2025	0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel Tahun 2025	0,00
Total Pengurangan :	0,00
Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**0,00**

e. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Aset Tetap Lainnya BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang per 31 Desember 2025 sebesar 0,00 meningkat sebesar 0,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 yang sebesar 0,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	**0,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Tahun 2025	0,00
- Hibah Aset Tetap Lainnya dari Kementerian Pusat Tahun 2025	0,00
Total Penambahan	**0,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Lainnya	0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Tahun 2025	0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel Tahun 2025	0,00

Uraian	Jumlah
Total Pengurangan :	0,00
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya	0,00

3. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya dapat berupa Aset Tidak Berwujud dan Aset Rusak Berat/Tidak Digunakan Lagi dalam Operasional Kegiatan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang mencatat Aset Lainnya sebesar 0,00 terdiri dari Aset Tidak Berwujud (Software, dll) sebesar 0,00 dan Aset Rusak Berat/Tidak Digunakan Lagi dalam Operasional Kegiatan sebesar 0,00. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Lainnya	**0,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Lainnya	0,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Tahun 2025	0,00
- Hibah Aset Lainnya dari Kementerian Pusat Tahun 2025	0,00
Total Penambahan	**0,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Lainnya	0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Tahun 2025	0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel Tahun 2025	0,00
Total Pengurangan :	0,00
Saldo Akhir Aset Lainnya	**0,00**

4. Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang tidak memiliki kewajiban. (sesuaikan angka pada laporan neraca)

5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinag pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pada Tahun 2025 Ekuitas adalah sebesar Rp -476.579.456,65.

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Ekuitas	**0,00**
- Surplus/Defisit LO	-476.579.456,65
- Koreksi Ekuitas	0,00
Saldo Ekuitas Akhir	**-476.579.456,65**

5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional
b) Beban dari kegiatan operasional
c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
d) Pos luar biasa
e) Surplus/defisit LO

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional

Pendapatan LO dari kegiatan operasional terdiri dari :

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2025 sebesar Rp 1.050.000,00 lebih tinggi dari Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan TEFA Jasa Layanan Masyarakat	1.050.000,00	0,00	100	1.050.000,00
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO	**1.050.000,00**	**0,00**	**100**	**1.050.000,00**

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2025 sebesar 4.936.000.000,00 lebih tinggi dari pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2024 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan)
Hibah Kementerian	4.936.000.000,00	0,00	100	4.936.000.000,00
Total Pendapatan BLUD dari Hibah LO	**4.936.000.000,00**	**0,00**	**100**	**4.936.000.000,00**

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO Tahun 2025 sebesar Rp 25.500.000,00 lebih tinggi dari pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Tahun 2024 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan Hasil Kerja sama	25.500.000,00	0,00	100	25.500.000,00
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO	25.500.000,00	0,00	100	25.500.000,00

iv) Pendapatan BLUD dari APBD/APBN LO

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD LO Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 sama dengan dari pendapatan BLUD dari APBD LO sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Dana BOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana BOSDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pendapatan BLUD dari APBD LO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2025 sebesar Rp 86.464,00 lebih tinggi dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2024 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan usaha lainnya	86.464,00	0,00	100	86.464
Sewa Gedung/Aula/Lab	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO	**86.464**	0,00	**100**	**86.464**

b) Beban dari kegiatan operasional

1. Belanja Pegawai BLUD LO

Berupa Beban Gaji & Tunjangan dan Beban Tambahan Penghasilan BLUD LO dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp 0,00 lebih sama dengan dari beban pegawai BLUD LO tahun 2024 yang sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Beban Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Beban barang dan jasa LO tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 503.215.920,65 lebih tinggi dari dari Beban barang dan jasa LO tahun 2024 yang sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :.

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan
Beban Persediaan	0,00	0,00	0,00	0
Beban Jasa	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Beban Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0
Beban Penyusutan Aset	497.215.920,65	0,00	0,00	497.215.920,65
Total Beban Barang dan Jasa BLUD	503.215.920,65	0,00	0,00	503.215.920,65

c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan dikelompokkan dalam kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang. tahun 2025 sebesar 0,00.

d) Surplus/defisit LO

Surplus merupakan selisih antara pendapatan Rp 46.050.000,00 - Rp 503.215.920,65 (LO) dengan beban. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang mencatat Surplus/Defisit LO sebesar Rp -457.165.921

5.5 Laporan Arus Kas

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang pada Tahun 2025 sebesar 26.636.464,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.050.000,00	0
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	25.500.000,00	0
Pendapatan BLUD dari APBD	0	0
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	86.464,00	0
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	**26.636.464,00**	**0**

b. Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang selama Tahun 2025 sebesar Rp 6.000.000,00 terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Keluar Kas		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0
Belanja Perjalanan Dinas	0	0
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	**6.000.000,00**	**0**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas Rp 20.636.464,00 dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas Rp 6.000.000,00 sejumlah Rp 14.636.464,00 Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	20.636.464,00	0,00

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset Non-Keuangan lainnya.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan di masa yang akan datang.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang pada Tahun 2025 sebesar 0,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan Aset Tetap Tanah	0	0
Penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0	0
Penjualan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0	0
Penjualan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0
Penjualan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	0	0
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	**0**	**0**

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang pada Tahun 2025 sebesar Rp 78.045.000,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Keluar Kas		
Belanja Modal Tanah	64.397.300,00	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.647.700,00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	**78.045.000,00**	**0**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas Rp 0.00 dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp 0,00 Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	0,00	0,00

3) Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Periode 2025

Kenaikan/(penurunan) Kas Bersih Selama Periode Tahun 2025 merupakan akumulasi jumlah kenaikan/(penurunan) kas bersih dari Aktivitas Operasi Rp 20.636.464,00 Aktivitas Investasi Rp 0,00, Aktivitas Pendanaan Rp 0,00, Aktivitas Transitoris Rp 0,00.
Selama Tahun Anggaran 2025 terjadi kenaikan kas bersih sebesar Rp 20.636.464,00 yang terdiri dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp 20.636.464,00 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp (78.045.000,00). Perbandingan Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	20.636.464,00	0,00

4) Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025

Saldo akhir kas per 31 Desember 2025 merupakan perhitungan Saldo Awal per 1 Januari 2025 ditambah (dikurangi) dengan kenaikan/ (penurunan) kas bersih selama periode tahun 2025.
Saldo akhir kas di BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang. per 31 Desember 2025 sebesar Rp 20.636.464,00 didapat dari perhitungan saldo awal Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 ditambah penurunan kas bersih selama periode tahun 2025 sebesar Rp 20.636.464,00.
Total Saldo Kas BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang Per 31 Desember 2025 sebesar Rp 20.636.464,00 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas di BLUD	20.636.464,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	**20.636.464,00**	**0,00**

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

a) Ekuitas awal
b) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti:
   1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
   2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas Akhir

a) Ekuitas Awal

Pada Tahun 2025 BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang.. mencatat ekuitas awal sebesar 0,00 yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada laporan Tahun 2025. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jumlah Aset Tahun 2025 0,00
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025 0,00
- **Saldo Awal Ekuitas 2025 0,00**

b) Surplus/Defisit LO

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dalam Laporan Operasional Tahun 2025 tercatat sebesar (476.579.456,65).

c) Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar Rp 476.579.456,65 merupakan saldo kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Total Aset dan Total Kewajiban BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang Tahun 2025.

- Jumlah Aset Tahun 2025 (476.579.456,65)
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025 0,00
- **Saldo Akhir Ekuitas 2025 (476.579.456,65)**

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

BLUD SMK Negeri 3 dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 1407 Tahun 2024. BLUD SMK Negeri 3 beralamat di Jl. Sutan Sulaiman Kel. Kampung Bulang Kec. Tanjungpinang Timur, Kepulauan Riau.

6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nirlaba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun sebagai bentuk tanggung jawab BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, penyusunan laporan keuangan BLUD juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Secara umum pencapaian kinerja atas sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik, namun begitu masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang masih harus terus dibenahi dan menjadi perhatian oleh BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang.

Dengan memperhatikan strategisnya peran sekolah dan besarnya tantangan yang dihadapi untuk mendukung Visi Misi Pendidikan Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, SMK Negeri 3 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja serta memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan industri. Melalui pendekatan berbasis kompetensi, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta pengelolaan keuangan yang transparan melalui sistem BLUD, sekolah ini berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan lulusan SMK dapat menjadi tenaga kerja yang unggul dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.
Akhir kata, BLUD SMK Negeri 3 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan dalam penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban kami dalam menyajikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

Tanjungpinang, 25 Mei 2026

Pimpinan BLUD SMKN 3 Tanjungpinang
Provinsi Kepulauan Riau

Siswul Hadi, S.Pd.,M.Pd.
Pembina Utama Muda/IV-c
Nip. 196908191998031007

LAPORAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SMK NEGERI 4 TANJUNGPINANG
TAHUN 2025
(AUDITED)

I. DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan 1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 2
1.3. Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 3
1.4. Periode Pelaporan Keuangan 3
1.5. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 3
BAB II PROFIL BLUD SMKN 4 Tanjungpinang 4
2.1. Sumber Daya BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang 4
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang 5
2.3. Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang 5
BAB III Indikator Dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target 6
3 1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025 6
3.2. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi 7
BAB IV Kebijakan Akuntansi 9
4.1. Entitas Akuntansi 9
4.2. Asumsi Dasar Laporan Keuangan 9
4.3. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 9
4 4. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan10
4.5. Kebijakan Akuntansi Pendapatan 10
4.6. Kebijakan Akuntansi Belanja 10
4.7. Kebijakan Akuntansi Kas 10
4.8. Kebijakan Akuntansi Persediaan 10
4.9. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap 11
4.10. Kebijakan Akuntansi Kewajiban 11
BAB V Rincian Pos Pos Laporan Keuangan 13
5.1. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 13
a. Pendapatan – LRA 13
i. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 13
ii. Pendapatan BLUD dari Hibah 14
iii. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain ... 14
iv. Pendapatan BLUD dari APBD/APBN 14
v. Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah14
b. Belanja 14

i. Belanja Pegawai BLUD 14
ii. Belanja Barang dan Jasa BLUD 15
iii. Belanja Modal BLUD 15
5.2. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 15
1. Saldo Anggaran Lebih Awal 15
2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan15
3. Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA) .. 16
5.3. Neraca..... 16
1. Aset Lancar..... 16
a. Kas di Bendahara BLUD 16
b. Kas di Bendahara BOS 16
c. Persediaan..... 16
2. Aset Tetap..... 17
a. Tanah 17
b. Peralatan dan Mesin 17
c. Gedung dan Bangunan 17
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan..... 18
e. Aset Tetap Lainnya 18
3. Aset Lainnya 18
4. Kewajiban..... 18
5. Ekuitas 18
5.4. Laporan Oprasional 19
a. Laporan LO dari Kegiatan Oprasional..... 20
I. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO 20
II. Pendapatan BLUD dari Hibah LO..... 20
III. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO20
IV. Pendapatan BLUD dari APBD/APBN LO..... 20
V. Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO21
b. Beban dari kegiatan BLUD 21
I. Belanja Pegawai BLUD LO 21
II. Belanja Barang dan Jasa BLUD..... 21
c. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional 22
d. Surplus/defisit LO 22
5.5. Laporan Arus KAS 22
1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 22
a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi..... 22

b. Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi 22
2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi 23
a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi 23
b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi 24
3. Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Periode 2025 24
4. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025 25
5.6. Laporan Perubahan Ekuitas 25
a. Ekuitas Awal 25
b. Surplus/Defisit LO 25
c. Ekuitas Akhir 25
Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non-Keuangan 26
6.1. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi 26
7. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas 26
Bab VII Penutup 27

II. DAFTAR TABEL

BAB I Pendahuluan 1

BAB II PROFIL BLUD SMKN 4 Tanjungpinang 4

2 3. Tabel Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang 5

BAB III Indikator Dan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target 6

3.3. Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang Tahun 2025 6

BAB IV Kebijakan Akuntansi 9

BAB V Rincian Pos Pos Laporan Keuangan 13

5.1. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 13

a. Table Pendapatan – LRA 13

i. Table Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 13

ii. Table Pendapatan BLUD dari Hibah 14

iii. Table Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain 14

iv. Table Pendapatan BLUD dari APBD/APBN 14

v. Table Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 14

b. Belanja 14

i. Table Belanja Pegawai BLUD 14

ii. Table Belanja Barang dan Jasa BLUD 15

iii. Table Belanja Modal BLUD 15

5.2. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 15

5.3. Neraca 16

1. Aset Lancar 16

a. Table Kas di Bendahara BLUD 16

b. Table Kas di Bendahara BOS 16

c. Table Persediaan 16

2. Aset Tetap 17

b. Table Peralatan dan Mesin 17

c. Table Gedung dan Bangunan 17

d. Table Jalan, Irigasi dan Jaringan 18

e. Table Aset Tetap Lainnya 18

3. Table Aset Lainnya 18

5.4. Laporan Oprasional 19

a. Laporan LO dari Kegiatan Oprasional 20

I. Table Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO 20
II. Table Pendapatan BLUD dari Hibah LO 20
III. Table Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO.....20
IV. Table Pendapatan BLUD dari APBD/APBN LO 20
V. Table Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO 21
b. Beban dari kegiatan BLUD 21
III. Table Belanja Pegawai BLUD LO 21
IV. Table Belanja Barang dan Jasa BLUD 21
c. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional 22
d. Surplus/defisit LO 22
5.5. Laporan Arus KAS 22
1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 22
a. Table Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi 22
b. Table Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi 22
2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi 23
a. Table Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi 23
b. Table Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi 24
3. Table Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Periode 2025..... 24
4. Table Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025 25
5.6. Laporan Perubahan Ekuitas 25
Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non-Keuangan 26
7.1. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi 26
8. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas 26
Bab VII Penutup 27

III. Daftar grafik
IV. Daftar Lampiran

V. Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kami berharap dengan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) di Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Yayuk Sri Mulyani Rahayu, S.Pd., M.M.
Pembina Tk.I
NIP 197704212005022011

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan SMK Negeri 4 Tanjungpiang Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (iii) Neraca; (iv) Laporan Operasional (LO); (v) Laporan Arus Kas (LAK); (vi) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (vii) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Yayuk Sri Mulyani Rahayu, S.Pd., M.M.
Pembina Tk.I
NIP 197704212005022011

VI. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SMK NEGERI 4 TANJUNGPINANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN**	**2.292.283.000,00**	**2.190.829.095,00**	**95,57**	**0,00**
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	0,00	0,00	#NUM!	0,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00	#NUM!	0,00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
6	Pendapatan Hibah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan APBN/APBD	2.160.750.000,00	2.160.750.000,00	100,00	0,00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	1.533.000,00	79.095,00	5,16	0,00
	Jumlah PENDAPATAN	**2.292.283.000,00**	**2.190.829.095,00**	**95,57**	**0,00**
9	**BELANJA**				
10	**BELANJA OPERASI**	**1.274.562.000,00**	**1.173.029.000,00**	**92,03**	**0,00**
11	Belanja Pegawai	0,00	0,00	#NUM!	0,00
12	Belanja Barang dan Jasa	1.274.562.000,00	1.173.029.000,00	92,03	0,00
13	Bunga	0,00	0,00	#NUM!	0,00
14	Belanja Lain-lain	0,00	0,00	#NUM!	0,00
15	**BELANJA MODAL**	**1.017.721.000,00**	**1.017.721.000,00**	**100,00**	**0,00**
16	Belanja Tanah	0,00	0,00	#NUM!	0,00
17	Belanja Peralatan dan Mesin	799.659.000,00	799.659.000,00	100,00	0,00
18	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	#NUM!	0,00
19	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	#NUM!	0,00
20	Belanja Aset Tetap Lainnya	218.062.000,00	218.062.000,00	100,00	0,00
21	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	#NUM!	0,00
	Jumlah BELANJA	**2.292.283.000,00**	**2.190.750.000,00**	**95,57**	**0,00**
	Surplus/ Defisit Sebelum Pembiayaan	**0,00**	**79.095,00**	**0,00**	**0,00**
22	**PENERIMAAN**				
23	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**0,00**	**0,00**	**#NUM!**	**0,00**
24	Penggunaan SILPA	0,00	0,00	#NUM!	0,00
25	Penerimaan dari Divestasi	0,00	0,00	#NUM!	0,00
26	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00	#NUM!	0,00
	Jumlah PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**0,00**	**0,00**	**#NUM!**	**0,00**

27	**PENGELUARAN**				
28	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**0,00**	**0,00**	**#NUM!**	**0,00**
29	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00	#NUM!	0,00
30	Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00	#NUM!	0,00
31	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00	#NUM!	0,00
	Jumlah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**0,00**	**0,00**	**#NUM!**	**0,00**
	Pembiayaan Neto	**0,00**	**0,00**	**#NUM!**	**0,00**
	Surplus/ Defisit	**0,00**	**79.095,00**	**0,00**	**0,00**

Tanjungpinang, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Yayuk Sri Mulyani Rahayu, S.Pd., M.M.
Pembina Tk.I
NIP 197704212005022011

VII. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMK NEGERI 4 TANJUNGPINANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	**7.5.2.1**	0.00	0.00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**7.5.2.2**	0.00	0.00
3	Subtotal (1-2)		0.00	0.00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	**7.5.2.3**	79,095.00	0.00
5	Subtotal (3+4)		79,095.00	0.00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0.00	0.00
7	Lain-lain		0.00	0.00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	**7.5.2.6**	79,095.00	0.00

Tanjungpinang, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Yayuk Sri Mulyani Rahayu, S.Pd., M.M.
Pembina Tk.I
NIP 197704212005022011

VIII. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMK NEGERI 4 TANJUNGPINANG

NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
	ASET		**7.094.609.324,64**	**0,00**
	ASET LANCAR		**79.095,00**	**0,00**
	Kas dan Setara Kas		**79.095,00**	**0,00**
	Kas di BLUD		**79.095,00**	**0,00**
	Kas di BLUD		**79.095,00**	**0,00**
	Kas di BLUD		79.095,00	0,00
	Persediaan		**0,00**	**0,00**
	Barang Pakai Habis		**0,00**	**0,00**
	Bahan		**0,00**	**0,00**
	Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi		0,00	0,00
	Persediaan Bahan Kimia		0,00	0,00
	Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas		0,00	0,00
	Persediaan Bahan Baku		0,00	0,00
	Persediaan Bahan Makanan Pokok		0,00	0,00
	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman		0,00	0,00
	Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran		0,00	0,00
	Persediaan Isi Tabung Gas		0,00	0,00
	Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan		0,00	0,00
	Persediaan Bahan Lainnya		0,00	0,00
	Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran		0,00	0,00
	Suku Cadang		**0,00**	**0,00**
	Suku Cadang Alat Kedokteran		0,00	0,00
	Suku Cadang Alat Bengkel		0,00	0,00
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		**0,00**	**0,00**
	Persediaan Alat Tulis Kantor		0,00	0,00
	Persediaan Kertas dan Cover		0,00	0,00
	Persediaan Bahan Cetak		0,00	0,00
	Persediaan Benda Pos		0,00	0,00
	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender		0,00	0,00
	Persediaan Bahan Komputer		0,00	0,00
	Persediaan Perabot Kantor		0,00	0,00
	Persediaan Alat Listrik		0,00	0,00

	Persediaan Perlengkapan Dinas		0,00	0,00
	Perlengkapan Pendukung Olahraga		0,00	0,00
	Suvenir/Cendera Mata		0,00	0,00
	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainny		0,00	0,00
	Obat-obatan		**0,00**	**0,00**
	Persediaan Obat		0,00	0,00
	Persediaan Obat-obatan Lainnya		0,00	0,00
	Natura dan Pakan		**0,00**	**0,00**
	Natura		0,00	0,00
	Pakan		0,00	0,00
	Natura dan Pakan Lainnya		0,00	0,00
	Jumlah ASET LANCAR		**79.095,00**	**0,00**
	ASET TETAP		**7.094.530.229,64**	**0,00**
	Tanah		**1.276.367.488,00**	**0,00**
	Tanah		**1.276.367.488,00**	**0,00**
	Tanah Persil		**1.276.367.488,00**	**0,00**
	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja		1.276.367.488,00	0,00
	Peralatan dan Mesin		**4.632.492.238,00**	**0,00**
	Alat Besar		**895.000,00**	**0,00**
	Alat Bantu		**895.000,00**	**0,00**
	Pompa		895.000,00	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		**4.029.504.232,00**	**0,00**
	Alat Kantor		**3.900.674.232,00**	**0,00**
	Alat Kantor Lainnya		3.900.674.232,00	0,00
	Alat Rumah Tangga		**128.830.000,00**	**0,00**
	Mebel		24.160.000,00	0,00
	Alat Pendingin		65.620.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		39.050.000,00	0,00
	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		**14.300.000,00**	**0,00**
	Alat Studio		**14.300.000,00**	**0,00**
	Peralatan Studio Video dan Film		14.300.000,00	0,00
	Alat Laboratorium		**34.113.006,00**	**0,00**
	Alat Peraga Praktik Sekolah		**34.113.006,00**	**0,00**
	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga		10.313.006,00	0,00
	Alat Peraga Kejuruan		23.800.000,00	0,00
	Komputer		**553.680.000,00**	**0,00**
	Komputer Unit		**504.500.000,00**	**0,00**
	Komputer Jaringan		494.000.000,00	0,00
	Personal Computer		10.500.000,00	0,00
	Peralatan Komputer		**49.180.000,00**	**0,00**
	Peralatan Komputer Lainnya		49.180.000,00	0,00
	Gedung dan Bangunan		**698.853.420,00**	**0,00**
	Bangunan Gedung		**698.853.420,00**	**0,00**
	Bangunan Gedung Tempat Kerja		**698.853.420,00**	**0,00**
	Bangunan Gedung Kantor		698.853.420,00	0,00
	Jalan, Jaringan, dan Irigasi		**188.751.805,00**	**0,00**

	Jalan dan Jembatan		**188.751.805,00**	**0,00**
	Jalan		**188.751.805,00**	**0,00**
	Jalan Nasional		188.751.805,00	0,00
	Aset Tetap Lainnya		**1.020.135.275,00**	**0,00**
	Bahan Perpustakaan		**1.020.135.275,00**	**0,00**
	Bahan Perpustakaan Tercetak		**1.018.248.275,00**	**0,00**
	Buku Umum		823.439.775,00	0,00
	Buku Filsafat		109.075.000,00	0,00
	Buku Agama		11.520.000,00	0,00
	Buku Ilmu Bahasa		12.566.000,00	0,00
	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam		2.565.500,00	0,00
	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis		57.971.500,00	0,00
	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah		1.110.500,00	0,00
	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro		**1.887.000,00**	**0,00**
	Audio Visual		1.887.000,00	0,00
	Akumulasi Penyusutan		**(722.069.996,36)**	**0,00**
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		**(722.069.996,36)**	**0,00**
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung		**(722.069.996,36)**	**0,00**
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan		(722.069.996,36)	0,00
	Jumlah ASET TETAP		**7.094.530.229,64**	**0,00**
	JUMLAH ASET		**7.094.609.324,64**	**0,00**
	EKUITAS		**7.094.609.324,64**	**0,00**
	EKUITAS		**7.094.609.324,64**	**0,00**
	Ekuitas		**7.094.609.324,64**	**0,00**
	Ekuitas		**7.094.609.324,64**	**0,00**
	Ekuitas		**7.094.609.324,64**	**0,00**
	Ekuitas		7.094.609.324,64	0,00
	Jumlah EKUITAS		**7.094.609.324,64**	**0,00**
	JUMLAH EKUITAS		**7.094.609.324,64**	**0,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**7.094.609.324,64**	**0,00**

Tanjungpinang, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Yayuk Sri Mulyani Rahayu, S.Pd., M.M.
Pembina Tk.I
NIP 197704212005022011

IX. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BLUD SMK NEGERI 4 TANJUNGPINANG

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	**PENDAPATAN**				
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	0,00	0,00	0,00	#NUM!
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00	0,00	#NUM!
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
5	Pendapatan Hibah	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00
6	Pendapatan Usaha Lainnya	79.095,00	0,00	79.095,00	100,00
7	Pendapatan APBN/ APBD	2.160.750.000,00	0,00	2.160.750.000,00	100,00
	Jumlah PENDAPATAN	**2.290.829.095,00**	**0,00**	2.290.829.095,00	100,00
8	**BEBAN**				
9	Beban Pegawai	0,00	0,00	0,00	#NUM!
10	Beban Persediaan	661.296.003,00	0,00	661.296.003,00	100,00
11	Beban Jasa	220.612.000,00	0,00	220.612.000,00	100,00
12	Beban Pemeliharaan	11.854.600,00	0,00	11.854.600,00	100,00
13	Beban Langganan Daya dan Jasa	250.728.442,00	0,00	250.728.442,00	100,00
14	Beban Perjalanan Dinas	202.102.955,00	0,00	202.102.955,00	100,00
15	Beban Penyusutan Aset	722.069.996,36	0,00	722.069.996,36	100,00
16	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	#NUM!
	Jumlah BEBAN	**2.068.663.996,36**	**0,00**	2.068.663.996,36	100,00
	Surplus/Defisit Operasional	**222.165.098,64**	**0,00**	222.165.098,64	100,00
17	**KEGIATAN NON OPERASIONAL**				
18	Surplus/ Defisit Penjualan Aset Nonlancar	0,00	0,00	0,00	#NUM!
19	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	0,00	0,00	0,00	#NUM!
20	Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	#NUM!
	Jumlah Surplus/Defisit Dari KEGIATAN NON OPERASIONAL	**0,00**	**0,00**	0,00	#NUM!
	Surplus/Defisit Sebelum POS LUAR BIASA	**222.165.098,64**	**0,00**	222.165.098,64	100,00
21	**POS LUAR BIASA**				
22	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	#NUM!

23	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	#NUM!
	Jumlah POS LUAR BIASA	**0,00**	**0,00**	0,00	#NUM!
	Surplus/Defisit-LO	**222.165.098,64**	**0,00**	222.165.098,64	100,00

Tanjungpinang, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Yayuk Sri Mulyani Rahayu, S.Pd., M.M.
Pembina Tk.I
NIP 197704212005022011

X. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BLUD SMK NEGERI 4 TANJUNGPINANG

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	**Arus Masuk Kas**		
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	0,00	0,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	30.000.000,00	0,00
6	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
7	Pendapatan APBN/APBD	2.160.750.000,00	0,00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	79.095,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	2.190.829.095,00	0,00
9	**Arus Keluar Kas**		
10	Pembayaran Pegawai	0,00	0,00
11	Pembayaran Barang dan Jasa	740.912.107,00	0,00
12	Pembayaran Pemeliharaan	11.854.600,00	0,00
13	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	250.728.442,00	0,00
14	Pembayaran Perjalanan Dinas	169.533.851,00	0,00
15	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	1.173.029.000,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi	1.017.800.095,00	0,00
16	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
17	**Arus Masuk Kas**		
18	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
19	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
20	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
21	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
22	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
23	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
24	Penerimaan dari Divestasi	0,00	0,00
25	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
26	**Arus Keluar Kas**		
27	Perolehan Tanah	0,00	0,00
28	Perolehan Peralatan dan Mesin	799.659.000,00	0,00
29	Perolehan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
30	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00

31	Perolehan Aset Tetap Lainnya	218.062.000,00	0,00
32	Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
33	Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00
34	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	1.017.721.000,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(1.017.721.000,00)	0,00
35	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**		
36	**Arus Masuk Kas**		
37	Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00
38	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
39	**Arus Keluar Kas**		
40	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00
41	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00
42	Penyetoran ke Kas Negara	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
43	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**		
44	**Arus Masuk Kas**		
45	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
46	**Arus Keluar Kas**		
47	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
48	**Kenaikan/ Penurunan Kas BLU**	79.095,00	0,00
49	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLU**	0,00	0,00
50	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU**	79.095,00	0,00

Tanjungpinang, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Yayuk Sri Mulyani Rahayu, S.Pd., M.M.
Pembina Tk.I
NIP 197704212005022011

XI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BLUD SMK NEGERI 4 TANJUNGPINANG

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Ekuitas Awal		0,00	0,00
2	Surplus/Defisit-LO		222.165.098,64	0,00
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		6.872.444.226,00	0,00
4	Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
6	Lain-lain		0,00	0,00
7	Ekuitas Akhir		**7.094.609.324,64**	**0,00**

Tanjungpinang, Januari 2026

PIMPINAN BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Yayuk Sri Mulyani Rahayu, S.Pd., M.M.
Pembina Tk.I
NIP 197704212005022011

XII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun sebagai bentuk tanggung jawab BLUD SMK Negeri Negeri 4 Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, penyusunan laporan keuangan BLUD juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Secara umum pencapaian kinerja atas sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik, namun begitu masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang masih harus terus dibenahi dan menjadi perhatian oleh BLUD SMK Negeri Negeri 4 Tanjungpinang

Dengan memperhatikan strategisnya peran sekolah dan besarnya tantangan yang dihadapi untuk mendukung Visi Misi Pendidikan Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, SMK Negeri Negeri 4 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja serta memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan industri. Melalui pendekatan berbasis kompetensi, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta pengelolaan keuangan yang transparan melalui sistem BLUD, sekolah ini berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan lulusan SMK dapat menjadi tenaga kerja yang unggul dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional

I. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Laporan Keuangan BLUD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran ;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan BLUD.
Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala BLUD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan BLUD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SMK Negeri 4 Tanjungpinang Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan RiauTahun 2024.
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan peraturan Kedua Atas Peraturan Gubernur no 75 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah.
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daearah.

1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang Tahun 2025, adalah tanggungjawab sepenuhnya BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang, dalam hal ini adalah Pimpinan BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang.

1.4 Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (*Subsequent Event*) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang tahun 2026. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2026.

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang
- 1.4 Periode Pelaporan Keuangan
- 1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Profil BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang
- 2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang
- 2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang tahun 2025

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Asumsi dasar Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- 4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja
- 4.7 Kebijakan Akuntansi Kas
- 4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan
- 4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- 4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Neraca
- 5.4 Laporan Operasional
- 5.5 Laporan Arus Kas
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.7 Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan atas informasi – Informasi non Keuangan
- 6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
- 6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

Bab VII Penutup

BAB II

PROFIL BLUD SMK NEGERI 4 TANJUNGPINANG

2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang

Data bisa diperoleh dari RENSTRA Sekolah SMK Negeri 4 Tanjungpinang.dst

BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten serta tenaga ahli yang mendukung pelaksanaan *Teaching Factory (TEFA)*. SDM yang tersedia meliputi:

1. Tenaga Pendidik (Guru Produktif dan Normatif):
   - Guru bersertifikasi keahlian industri sesuai bidang kompetensi.
   - Guru mata pelajaran umum yang mendukung kurikulum berbasis kompetensi.
   - Instruktur dari dunia industri yang terlibat dalam program pelatihan siswa.
2. Tenaga Kependidikan:
   - Staf administrasi yang mengelola keuangan dan operasional BLUD.
   - Teknisi laboratorium dan bengkel untuk mendukung kegiatan praktik.
   - Tenaga keamanan dan kebersihan untuk menjaga lingkungan sekolah yang kondusif.
3. Kemitraan dengan Industri:
   - Mengundang praktisi industri sebagai instruktur tamu.
   - Menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk program magang dan penyerapan tenaga kerja.
   - Mengembangkan skema sertifikasi kompetensi yang diakui dunia usaha dan industri.

Sebagai SMK BLUD yang berbasis *Teaching Factory* (TEFA) dan Unit Produksi (UP), sekolah telah memiliki berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran berbasis produksi dan layanan industri, di antaranya:

1. Ruang Kelas dan Laboratorium:
   - Ruang kelas berbasis IT untuk pembelajaran teori.
   - Laboratorium komputer untuk simulasi bisnis digital dan desain grafis.
   - Perpustakaan digital sebagai pusat referensi dan literasi siswa.
2. Workshop dan Bengkel TEFA / UP:
   - Bengkel otomotif dengan peralatan servis kendaraan standar industri.
   - Dapur produksi kuliner yang dilengkapi dengan peralatan skala industri.
   - Studio desain dan multimedia untuk produksi konten digital dan video.
   - Workshop teknik bangunan untuk pelatihan konstruksi dan produksi material.
3. Fasilitas Pendukung:
   - Asrama atau tempat tinggal bagi siswa yang berasal dari luar daerah.
   - Ruang pemasaran produk hasil Teaching Factory.
   - Area publik seperti kantin dan koperasi sekolah yang dikelola oleh siswa.

Sebagai BLUD, SMK memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan Teaching Factory. Sumber dana sekolah berasal dari:

1. Dana BOS dan APBD:
   - Digunakan untuk operasional sekolah, gaji guru, serta pengadaan bahan ajar dan alat praktik.
2. Pendapatan dari Unit Usaha TEFA:
   - Hasil penjualan produk dari unit Teaching Factory.

- Jasa layanan seperti servis otomotif, desain grafis, atau catering.
- Kerjasama dengan industri dalam proyek tertentu.

3. Bantuan dari Pemerintah dan Swasta:
   - Hibah atau bantuan dari pemerintah untuk pengembangan kurikulum dan fasilitas.
   - Sponsor dari perusahaan yang mendukung pengembangan Teaching Factory.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang

Data bisa diperoleh dari RENSTRA Sekolah.

2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang

Tabel Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang.

No	Unit Teaching Factory (TEFA)	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Keterangan
1	**TEFA Rekayasa Perangkat Lunak**	Produksi Aplikasi	0,00	0,00	0,00	Tefa Belum Berjalan
2	**TEFA GIM**	Produksi Aset Gim	0,00	0,00	0,00	Tefa Belum Berjalan
3	**TEFA TKJ**	Jasa Layanan Internet	0,00	0,00	0,00	Tefa Belum Berjalan
4	**TEFA DKV**	Produksi Desain Grafis	0,00	0,00	0,00	Tefa Belum Berjalan
5	**TEFA PSPT**	Jasa Pembuatan Iklan	0,00	0,00	0,00	Tefa Belum Berjalan
6	**TEFA Animasi**	Produksi Modelling Asset	0,00	0,00	0,00	Tefa Belum Berjalan

BAB III

INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI

PENCAPAIAN TARGET

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja pada BLUD SMK, pada laporan keuangan ini digunakan sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat managemen yang digunakan untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran dan tujuan, untuk mewujudkan misi dan visi organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut akan disajikan data kinerja BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
A. Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa					
1	Persentase kelulusan siswa	100%	100%	100%	100% siswa lulus
2	Rata-rata nilai Ujian Kompetensi Keahlian (UKK)	≥ 85	80	94%	Mencapai target
3	Persentase siswa yang memperoleh sertifikasi kompetensi industri	25%	2%	8%	8% siswa yang memperoleh sertifikat lulus uji sertifikasi
4	Persentase lulusan yang bekerja sesuai kompetensi dalam 6 bulan	60%	58%	97%	Hampir mencapai target, perlu peningkatan kemitraan
5	Persentase lulusan yang berwirausaha	10%	12%	120%	Melebihi target, program wirausaha berjalan baik
B. Kinerja Keuangan dan Unit Usaha BLUD					
6	Persentase pendapatan unit usaha BLUD terhadap biaya operasional sekolah	100%	100%	100%	Hampir mencapai target, strategi pemasaran perlu ditingkatkan
7	Efisiensi penggunaan dana BLUD sesuai rencana kerja	90%	95%	105%	Anggaran terserap dengan baik dan efektif
C. Kinerja Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)					
8	Jumlah kerja sama aktif dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	7 mitra	7 mitra	100%	Melebihi target, kerja sama dengan lebih banyak perusahaan
9	Persentase siswa yang menjalani magang industry/PKL	100%	100%	100%	Semua siswa telah menjalani magang
10	Jumlah produk atau jasa unggulan dari Teaching Factory (TEFA)	6 produk	1 produk	16 %	Produk yang belum mencapai standar pasar
D. Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan					
11	Kepuasan siswa dan orang tua terhadap layanan pendidikan	85%	88%	103%	Melebihi target berdasarkan survei internal
12	Jumlah guru produktif bersertifikasi industri	75%	75%	100%	Hampir mencapai target, ada guru dalam proses sertifikasi

Berdasarkan tabel pencapaian, secara keseluruhan SMK BLUD telah mencapai rata-rata 86,91% dari target yang ditetapkan. Beberapa indikator

bahkan melebihi target, seperti wirausaha lulusan, jumlah mitra industri, dan kepuasan siswa. Namun, ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, seperti pencapaian sertifikasi kompetensi siswa dan pengembangan produk Teaching Factory. Untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memperkuat kemitraan dengan industri untuk meningkatkan jumlah lulusan yang bekerja sesuai kompetensi.
2. Optimalisasi pemasaran unit usaha BLUD untuk meningkatkan pendapatan sekolah.
3. Meningkatkan kesiapan siswa dalam uji sertifikasi industri melalui bimbingan tambahan.
4. Pengembangan produk Teaching Factory agar lebih kompetitif di pasar.

Dengan perbaikan strategi ini, diharapkan SMK BLUD dapat mencapai 100% target di tahun mendatang.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Adapun hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target realisasi antara lain :

b. Hambatan dalam Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa

1. Kurangnya kesiapan siswa dalam ujian sertifikasi industri
   - Tidak semua siswa memiliki kesiapan yang cukup untuk lulus uji sertifikasi.
   - Kurangnya akses terhadap bahan ajar atau simulasi ujian sesuai standar industri.
   - Biaya sertifikasi yang masih menjadi kendala bagi sebagian siswa.
2. Tingkat kelulusan yang belum 100%
   - Beberapa siswa mengalami kesulitan dalam mata pelajaran teori maupun praktik.
   - Kurangnya motivasi belajar dan tingkat kehadiran siswa yang rendah.
3. Penyerapan lulusan ke dunia kerja belum optimal
   - Persaingan ketat di dunia kerja sehingga tidak semua lulusan langsung terserap.
   - Kurangnya pengalaman praktis yang relevan dengan kebutuhan industri.
   - Masih ada lulusan yang lebih memilih bekerja di luar bidang keahlian mereka.

b. Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan dan Unit Usaha BLUD

1. Pendapatan unit usaha BLUD belum mencapai target
   - Persaingan dengan produk atau jasa dari industri komersial yang lebih mapan.
   - Kurangnya strategi pemasaran dan branding produk/jasa SMK BLUD.
   - Keterbatasan modal untuk meningkatkan skala produksi dan inovasi produk.
2. Efisiensi penggunaan dana BLUD
   - Masih ada beberapa program yang belum berjalan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas.
   - Keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah atau sumber pendanaan lain.

c. Hambatan dalam Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)

1. Jumlah produk unggulan Teaching Factory belum optimal
   - Keterbatasan bahan baku atau alat produksi yang menyebabkan terhambatnya pengembangan produk baru.
   - Produk belum sepenuhnya sesuai standar pasar, sehingga masih butuh perbaikan dalam kualitas dan pemasaran.
2. Kemitraan industri masih perlu diperluas

- Tidak semua industri bersedia menerima siswa magang karena keterbatasan kapasitas mereka.
- Kurangnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja.

d. Hambatan dalam Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan

1. Tingkat kepuasan siswa dan orang tua belum maksimal
   - Beberapa siswa merasa materi pembelajaran masih kurang relevan dengan dunia kerja.
   - Orang tua belum sepenuhnya memahami konsep BLUD di SMK, sehingga kurang mendukung program sekolah.
2. Kurangnya jumlah guru bersertifikasi industri
   - Tidak semua guru memiliki kesempatan mengikuti pelatihan atau sertifikasi karena keterbatasan waktu dan biaya.
   - Masih ada kendala administratif dalam proses pengajuan sertifikasi guru ke lembaga industri terkait.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Akuntansi adalah BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas;
b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau adalah:

a) ***Basis Kas*** untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam ***Laporan Realisasi Anggaran***
Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat Kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

b) ***Basis akrual*** untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam ***Neraca***
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

c) ***Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran*** berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riautidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

d) ***Basis akrual untuk neraca*** berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas;

4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengakuan dan pengukuran atas transaksi kejadian ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan ini adalah:

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.
   Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD , adalah sebagai berikut:
   a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
   b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
   c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;

d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang tahun 2025, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat Diterima pada Rekening Kas Umum. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum untuk seluruh transaksi setelah dilakukan pengesahan definitif bendahara. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

4.7 Kebijakan Akuntansi Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas secara umum diakui jika memenuhi kriteria:

a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.

4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang

yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari:

- Barang Konsumsi;
- Bahan untuk pemeliharaan;
- Suku cadang;
- Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
- Bahan baku;
- Barang dalam proses/setengah jadi;

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal; diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.

4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.

4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa

pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

BAB V RINCIAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang telah disusun BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini:

5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan – LRA

Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp 2.190.829.095,00 atau sebesar 95.57% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 2,292,283,000.00 sebagaimana ikhtisar sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN**	**2.292.283.000,00**	**2.190.829.095,00**	**95,57**	**0,00**
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	0,00	0,00	#NUM!	0,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00	#NUM!	0,00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
6	Pendapatan Hibah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan APBN/APBD	2.160.750.000,00	2.160.750.000,00	100,00	0,00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	1.533.000,00	79.095,00	5,16	0,00
	Jumlah PENDAPATAN	**2.292.283.000,00**	**2.190.829.095,00**	**95,57**	**0,00**

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Pendapatan TEFA RPL	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan TEFA GIM	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan TEFA TKJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pendapatan Pendapatan TEFA DKV	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan TEFA PSPT	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan TEFA Animasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 atau 0% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 100.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Hibah SPP				
Hibah Kementerian	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Total Pendapatan BLUD dari Hibah	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000.000,00**

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Tahun 2025 sebesar Rp30.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp30.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023
Kantin 1	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00
Kantin 2	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00
Kantin 3	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00
Kantin 4	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00,	6.000.000,00
Kantin 5	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**100,00**	**30.000.000,00**

iv) Pendapatan BLUD dari APBD/APBN

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD/APBN Tahun 2025 sebesar Rp2.160.750.000,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 2.160.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Dana BOSP	2.160.750.000,00	2.160.750.000,00	100,00	2.160.750.000,00
Dana BOSDA				
Total Pendapatan BLUD dari APBD	**2.160.750.000,00**	**2.160.750.000,00**	**100,00**	**2.160.750.000,00**

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp 79,095 atau 5,16% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp,1.533.000 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023
Pengembangan Usaha	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Giro	33.000	79.095,00	239,68	79.095,00
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	**1.533.000,00**	**79.095,00**	**5,16**	**79.095,00**

b. Belanja

1. Belanja Pegawai BLUD

Berupa Belanja Gaji & Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan BLUD dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00 % dari total anggaran belanja pegawai BLUD yang sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan	0,00	0,00	0,00
Dst...			
Total Belanja Pegawai BLUD	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp 1.273.029.000,00 atau 92,03% dari total anggaran belanja barang dan jasa yang sebesar Rp 1.274.562.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Barang	589.264.003,00	587.731.003,00	99,74
Belanja Jasa	471.340.442,00	447.940.442,00	95,04
Belanja Pemeliharaan	11.854.600,00	11.198.400,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	202.102.955,00	169.533.851,00	83,80
Total Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.274.562.000	1.173.029.000,00	92,03%

3. Belanja Modal BLUD

Belanja modal BLUD terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp 799.659.000,00 atau 100,00% dari total anggaran belanja modal peralatan dan mesin yang sebesar Rp799.659.000,00, belanja modal gedung dan bangunan yang terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total anggaran belanja modal gedung dan bangunan yang sebesar Rp,00,belanja Aset Tetap Lainnya yang terealisasi sebesar Rp 218.062.000 atau 100,00% dari total anggaran belanja modal gedung dan bangunan yang sebesar Rp 218.062.000 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
15	**BELANJA MODAL**	**1.017.721.000,00**	**1.017.721.000,00**	**100,00**	**0,00**
16	Belanja Tanah	0,00	0,00	#NUM!	0,00
17	Belanja Peralatan dan Mesin	799.659.000,00	799.659.000,00	100,00	0,00
18	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	#NUM!	0,00
19	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	#NUM!	0,00
20	Belanja Aset Tetap Lainnya	218.062.000,00	218.062.000,00	100,00	0,00
21	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	#NUM!	0,00

5.2 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo awal SAL pada tahun 2025 sebesar Rp 0,00 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

2) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan digunakan dalam rangka membiayai defisit tahun anggaran berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

3) Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SiLPA tahun 2025 sebesar Rp79.095,00

5.3 Neraca

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- Berupa kas/setara kas dan persediaan

Aset Lancar sebesar Rp79.095,00 yang dimiliki BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang per 31 Desember 2025 terdiri dari:

a. Kas di Bendahara BLUD

Kas BLUD adalah semua bentuk penerimaan dan pengeluaran uang tunai atau setara kas yang dikelola oleh SMK Negeri 4 Tanjungpinang dalam rangka menjalankan operasionalnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, dan pendapatan lainnya. Pada tahun 2024 saldo Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp0,00 dengan rincian :

Uraian	Jumlah
Kas di Bank	79.095,00
Kas Tunai	0,00
Total Kas di Bendahara BLUD	79.095,00

b. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan kas dibawah pengelolaan bendahara BOS yang bersumber dari pemerintah untuk mendukung operasional sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan tanpa membebani peserta didik. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp0,00 dengan rincian :

Uraian	Jumlah
Kas di Bank	0,00
Rek Bank Riau Kepri Syariah (BRKS)	0,00
Rek Bank Rek Bank Riau Kepri Syariah (BRKS)	0,00
Kas Tunai	0,00
Total Kas di Bendahara BOS	

c. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 terdiri dari :

Uraian	Jumlah
Persediaan Barang Habis Pakai	0,00
- Bahan	0,00
- Suku Cadang	0,00
Persediaan BarangTidak Habis Pakai	0,00
Total Persediaan	0,00

2. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh pelayanan umum. Aset tetap sebesar Rp7.816.600.226,00 per 31 Desember 2025 merupakan nilai perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan yang pengadaannya bersumber dari pengelolaan dana BOS dan dana SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dan BLUD.

a. Tanah

Nilai aset tanah BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.276.367.488,00 dan tidak terdapat penambahan aset tetap tanah selama tahun 2025.

b. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 4.691.582.738 meningkat sebesar Rp 4.632.492.238,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp 0. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**Rp 4.632.492.238,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 4.632.492.238,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0
- Reklasifikasi dari Aset Tetap xxxxx	Rp 0
- Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kementerian	Rp 0
Total Penambahan	**Rp 0**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0
Reklasifikasi ke Aset Tetap	0
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel...Dst	0
Total Pengurangan :	**Rp 0**
Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**Rp 4.632.492.238,00**

c. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang per 31 Desember 2025 sebesar Rp698.853.420,00 meningkat sebesar Rp698.853.420,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp 0,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**Rp 698.853.420,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 0
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0
- Reklasifikasi dari Aset Tetap xxxxx	Rp 0
- Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kementerian xxx ..... Dst	Rp 0
Total Penambahan	**Rp 0**
Pengurangan :	

Uraian	Jumlah
Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel...Dst	
Total Pengurangan :	**Rp 0**
Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**Rp 698.853.420,00**

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang per 31 Desember 2025 sebesar Rp188.751.805,00 meningkat sebesar Rp188.751.805,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp 0 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**Rp 188.751.805,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp0,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap xxxxx	Rp0,00
- Hibah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kementerian xxx .....Dst	Rp0,00
Total Penambahan	**Rp188.751.805,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel...Dst	
Total Pengurangan :	**Rp0**
Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**Rp188.751.805,00**

e. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Aset Tetap Lainnya BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang. per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.022.022.275,00 meningkat sebesar Rp1.020.135.275,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp0. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	**Rp1.020.135.275,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp1.020.135.275,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap xxxxx	Rp0,00
- Hibah Aset Tetap Lainnya dari Kementerian xxx.....Dst	Rp0,00
Total Penambahan	**Rp0,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Lainnya	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel...Dst	
Total Pengurangan :	**Rp0,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya	**Rp1.020.135.275,00**

3. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya dapat berupa Aset Tidak Berwujud dan Aset Rusak Berat/Tidak Digunakan Lagi dalam Operasional Kegiatan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang. mencatat Aset Lainnya sebesar Rp0,00 terdiri dari Aset Tidak Berwujud (Software, dll) sebesar Rp0,00 dan Aset Rusak Berat/Tidak Digunakan Lagi dalam Operasional Kegiatan sebesar Rp0,00. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Lainnya	**Rp0,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Lainnya	Rp0,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap xxxxx	Rp0,00
- Hibah Aset Lainnya dari Kementerian xxx.....Dst	Rp0,00
Total Penambahan	**Rp0,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Lainnya	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel...Dst	
Total Pengurangan :	**Rp0,00**
Saldo Akhir Aset Lainnya	**Rp0,00**

4. Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang tidak memiliki kewajiban. (sesuaikan angka pada laporan neraca)

5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pada Tahun 2025 Ekuitas adalah sebesar Rp7.094.609.324,00.

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Ekuitas	**Rp0,00**
- Surplus/Defisit LO	Rp 7.094.609.324.64
- Koreksi Ekuitas	Rp 7.094.609.324.64
Saldo Ekuitas Akhir	**Rp7,094.609.324,00**

5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional
b) Beban dari kegiatan operasional
c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
d) Pos luar biasa
e) Surplus/defisit LO

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional

Pendapatan LO dari kegiatan operasional terdiri dari :

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2025 sebesar Rp0,00 sama dengan Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan TEFA RPL	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan TEFA GIM	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan TEFA TKJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pendapatan Pendapatan TEFA DKV	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan TEFA PSPT	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan TEFA Animasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 lebih tinggi dari pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Hibah SPP				
Hibah Kementerian	0,00	0,00	100,00	100.000.00,00
Dst.....				
Total Pendapatan BLUD dari Hibah LO	0,00	0,00	**100,00**	**100.000.00,00**

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO Tahun 2025 sebesar Rp30.000.000,00 lebih tinggi dari pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Kantin 1	6.000.000,00	0,00	100,00	6.000.000,00
Kantin 2	6.000.000,00	0,00	100,00	6.000.000,00
Kantin 3	6.000.000,00	0,00	100,00	6.000.000,00
Kantin 4	6.000.000,00	0,00	100,00	6.000.000,00
Kantin 5	6.000.000,00	0,00	100,00	6.000.000,00
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO	**30.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**30.000.000,00**

iv) Pendapatan BLUD dari APBD/APBN LO

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD LO Tahun 2025 sebesar Rp2.160.750.000,00 lebih tinggi dari pendapatan BLUD dari APBD LO sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Dana BOSP	2.160.750.000,00	0,00	100,00	2.160.750.000,00
Dana BOSDA				

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Total Pendapatan BLUD dari APBD LO	**2.160.750.000,00**	**0,00**	**100,00**	**2.160.750.000,00**

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2025 sebesar Rp79.095,00 lebih tinggi dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Bagi Hasil Jasa Giro	79.095,00	0	100,00	79.095,00
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO	**79.095,00**	**0**	**100,00**	**79.095,00**

b) Beban dari kegiatan operasional

1. Belanja Pegawai BLUD LO

Berupa Beban Gaji & Tunjangan dan Beban Tambahan Penghasilan BLUD LO dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp0,00 sama dengan beban pegawai BLUD LO tahun 2024 yang sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Beban Pegawai BLUD	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Beban barang dan jasa LO tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.346.594,00 lebih tinggi/rendah dari dari Beban barang dan jasa LO tahun 2024 yang sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :.

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan
Beban Barang	661.296.003,00	0,00	100,00	661.296.003,00
Beban Jasa	471.340.442,00	0,00	100,00	220,612.000,00
Beban Pemeliharaan	11.854.600,00	0,00	100,00	11.854.600,00
Beban Langganan Daya dan Jasa	250.728.442,00	0,00	100,00	250.728.442,00
Beban Perjalanan Dinas	202.102.955,00	0,00	100,00	202.102.955,00
Beban Penyusutan Aset	722.069.996,36	0,00	100,00	722.069.996,36
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Beban Barang dan Jasa BLUD	1.346.594.000,00	0,00	100,00	1.346.594.000,00

c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan dikelompokkan dalam kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang tahun 2025 sebesar Rp 0,00.

d) Surplus/defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan beban. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang mencatat surplus/Defisit LO sebesar Rp 222.165.098,64.

5.5 Laporan Arus Kas

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang pada Tahun 2025 sebesar Rp2.290.829.095,00 yang terdiri dari003A

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Hibah	100.000.000,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	30.000.000,00	0,00
Pendapatan BLUD dari APBD	2.160.750.000,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	79.095,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	**2.290.892.095,00**	**0,00**

b. Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang selama Tahun 2025 sebesar Rp1.273.029.000,00 terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Keluar Kas		

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		
Belanja Pegawai	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	740.912.107,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	11.854.600,00	0,00
Belanja Langganan Barang dan Jasa	250.728.442,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	202.102.955,00	0,00
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.017.800.095,00	**0,00**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp1.017.800.095,00 Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.017.800.095,00	0,00

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset Non-Keuangan lainnya.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan di masa yang akan datang.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang. pada Tahun 2025 sebesar Rp0,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan Aset Tetap Tanah	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	**0,00**	**0,00**

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang pada Tahun 2025 sebesar Rp 1.017.721.000,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	799.659.000,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	218.062.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	**1.017.721.000**	**0,00**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rpxx,00 Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**-1.017.721.000,00**	0,00

3) Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Periode 2025

Kenaikan/(penurunan) Kas Bersih Selama Periode Tahun 2025 merupakan akumulasi jumlah kenaikan/(penurunan) kas bersih dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris.

Selama Tahun Anggaran 2025 terjadi kenaikan/penurunan kas bersih sebesar **Rp79.095,00** yang terdiri dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar **Rp1,017,800,095**,00 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar **Rp1,017,721,000**,00. Perbandingan Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	79.095,00	0,00

4) Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025

Saldo akhir kas per 31 Desember 2025 merupakan perhitungan Saldo Awal per 1 Januari 2025 ditambah (dikurangi) dengan kenaikan/ (penurunan) kas bersih selama periode tahun 2025.

Saldo akhir kas di BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang per 31 Desember 2025 sebesar R79.095,00 didapat dari perhitungan saldo awal Tahun 2025 sebesar Rp0,00 ditambah kenaikan/penurunan kas bersih selama periode tahun 2025 sebesar Rp Rp79.095,00.

Total Saldo Kas BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang Per 31 Desember 2025 sebesar Rp79.095,00 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas di BLUD	79.095,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	**79.095,00**	**0,00**

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

a) Ekuitas awal
b) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti:
   1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
   2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas Akhir

a) Ekuitas Awal

Pada Tahun 2025 BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang mencatat ekuitas awal sebesar Rp0,00 yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada laporan Tahun 2025. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jumlah Aset Tahun 2025 Rp7.094.609.324,64
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025 Rp 0,00
- **Saldo Awal Ekuitas 2025 Rp 0,00**

b) Surplus/Defisit LO

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dalam Laporan Operasional Tahun 2025 tercatat sebesar Rp 222.165.098,00.

c) Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar Rp7.094.609.324,64merupakan saldo kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Total Aset dan Total Kewajiban BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang Tahun 2025.

- Jumlah Aset Tahun 2025 Rp7.094.609.324,64
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025 Rp 0,00
- **Saldo Akhir Ekuitas 2025 Rp7.094.609.324,64**

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 1407 Tahun 2024

BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang beralamat di Jl. Nusantara KM. 14 Kota Tanjungpinang

6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nirlaba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di , dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang .

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 4 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun sebagai bentuk tanggung jawab BLUD SMK Negeri Negeri 4 Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, penyusunan laporan keuangan BLUD juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Secara umum pencapaian kinerja atas sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik, namun begitu masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang masih harus terus dibenahi dan menjadi perhatian oleh BLUD SMK Negeri Negeri 4 Tanjungpinang

Dengan memperhatikan strategisnya peran sekolah dan besarnya tantangan yang dihadapi untuk mendukung Visi Misi Pendidikan Indonesia yang

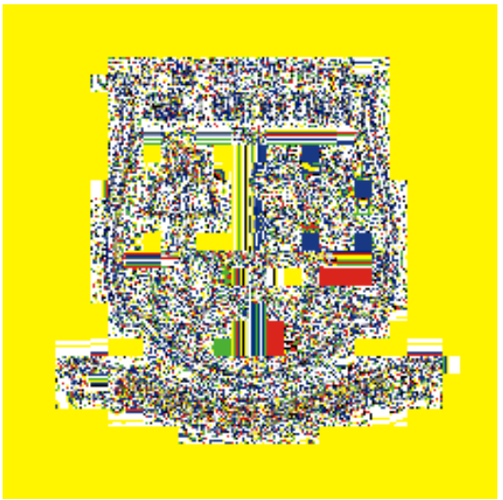
Berkualitas dan Berdaya Saing, SMK Negeri Negeri 4 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja serta memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan industri. Melalui pendekatan berbasis kompetensi, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta pengelolaan keuangan yang transparan melalui sistem BLUD, sekolah ini berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan lulusan SMK dapat menjadi tenaga kerja yang unggul dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Akhir kata, BLUD SMK Negeri Negeri 4 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan dalam penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban kami dalam menyajikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

Tanjungpinang, Januari 2026

PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 4 TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

YAYUK SRI MULYANI RAHAYU, S.Pd., M.M
Pembina Tk.1/IVb
NIP 19770421 200502 2 011



LAPORAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SMK NEGERI 1 BINTAN TIMUR
TAHUN 2025
(AUDITED)

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWAB ..... **viii**

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN ..... **ix**

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH ..... **xi**

C. NERACA ..... **xii**

D. LAPORAN OPERASIONAL ..... **xiv**

E. LAPORAN ARUS KAS ..... **xvi**

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ..... **xviii**

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 2
1.3 Penangungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 4
1.4 Priode Pelaporan Keuangan 4
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 4

BAB II POFIL BLUD SMK NEGERI 1 BINTAN TIMUR

2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur 6
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 1 Bintim 8
2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 1 Bintim 12

BAB III INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025 13
3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi 14

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi 16
4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan 16

4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 16
4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 16
4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan 17
4.6 Kebijakan Akuntasni Belanja 17
4.7 Kebijakan Akuntansi Kas 18
4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan 18
4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap 18
4.10 Kebijakam Akuntansi Kewajiban 19
BAB V RINCIAN POS POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 Penjelasan Pos pos Laporan Realisasi Anggaran 20
5.2 Penjelasan Pos pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 23
5.3 Neraca 23
5.4 Laporan Operasional 27
5.5 Laporan Arus Kas 30
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas 36
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi 37
6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas 37
BAB VII PENUTUP 38
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Anggaran dan Realisasi Program/ Kegiatan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur 12
Tabel. 2 Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target BLUD SMK Negeri Negeri 1 Bintan Timur 2025 13
Tabel. 3 Pendapatan LRA 20
Tabel. 4 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 20
Tabel. 5 Pendapatan BLUD dari Hibah 21
Tabel. 6 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain 21
Tabel. 7 Pendapatan BLUD dari APBD 21
Tabel. 8 Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah 22
Tabel. 9 Belanja Pegawai BLUD 22
Tabel. 10 Belanja Barang dan Jasa BLUD 22
Tabel. 11 Belanja Modal BLUD 22
Tabel. 12 Kas di Bendahara BLUD 23
Tabel. 13 Kas di Bendahara BOS 24
Tabel. 14 Persediaan 24
Tabel. 15 Peralatan dan Mesin 25
Tabel. 16 Gedung dan Bangunan 25
Tabel. 17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 26
Tabel. 18 Aset Tetap Lainnya 26
Tabel. 19 Aset Lainnya 27
Tabel. 20 Ekuitas 27
Tabel. 21 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO 28

Tabel. 22 Pendapatan BLUD dari Hibah LO 28
Tabel. 23 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO 28
Tabel. 24 Pendapatan BLUD dari APBD LO 29
Tabel. 25 Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah LO 29
Tabel. 26 Belanja Pegawai BLUD LO 29
Tabel. 27 Belanja Barang dan Jasa BLUD 29
Tabel. 28 Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi 30
Tabel. 29 Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi 31
Tabel. 29.1 Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi 31
Tabel. 30 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi 32
Tabel. 31 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi 32
Tabel. 3 2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 33
Tabel. 3 3 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan 33
Tabel. 3 4 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan 33
Tabel. 3 5 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 34
Tabel. 3 6 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris 34
Tabel. 3 7 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris 35
Tabel. 3 8 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 35
Tabel. 39 Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Priode 2025 36
Tabel. 3 10 Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025 36

DAFTAR LAMPIRAN

REKENING KORAN

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur, yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran; (ii) Neraca: (iii) Laporan Operasional: (iv) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD SMK N 1 Bintan Timur
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ERDATATI M, S.Pd
Penata Tk I/III/d
NIP.197703162005012006

KATA PENGANTAR

Sebagimana diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Menteri/ Pimpinan Lemabaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah sebagaimana telah dibuah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kami berharap dengan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) di Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLU D SMK N 1 Bintan Timur
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ERDATATI M. S.Pd
Penata Tk I/III/d
NIP. 19770316200501 2006

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 1 BINTAN TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**1,847,693,160.00**	**1,723,399,064.00**	**93.27**	**0.00**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**150,333,160.00**	**26,039,064.00**	**17.32**	**0.00**
4.1.04.	**Lain-lain PAD yang Sah**	**150,333,160.00**	**26,039,064.00**	**17.32**	**0.00**
4.1.04.16.	**Pendapatan BLUD**	**150,333,160.00**	**26,039,064.00**	**17.32**	**0.00**
4.1.04.16.02.	**Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan**	**15,000,000.00**	**8,415,800.00**	**56.11**	**0.00**
4.1.04.16.02.0001.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	15,000,000.00	8,415,800.00	56.11	0.00
4.1.04.16.03.	**Pendapatan BLUD dari Hibah**	**119,997,160.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.04.16.03.0001.	Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat	119,997,160.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.16.04.	**Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain**	**15,336,000.00**	**17,560,000.00**	**114.50**	**0.00**
4.1.04.16.04.0001.	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	15,336,000.00	17,560,000.00	114.50	0.00
4.1.04.16.06.	**Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah**	**0.00**	**63,264.00**	**#DIV/0!**	**0.00**
4.1.04.16.06.0001.	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	0.00	63,264.00	#DIV/0!	0.00
4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1,697,360,000.00**	**1,697,360,000.00**	**100.00**	**0.00**
4.2.01.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1,697,360,000.00**	**1,697,360,000.00**	**100.00**	**0.00**
4.2.01.01.	**Dana Perimbangan**	**1,697,360,000.00**	**1,697,360,000.00**	**100.00**	**0.00**
4.2.01.01.04.	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**	**1,697,360,000.00**	**1,697,360,000.00**	**100.00**	**0.00**
4.2.01.01.04.0001.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	1,697,360,000.00	1,697,360,000.00	100.00	0.00
5.	**BELANJA DAERAH**	**1,847,693,100.00**	**1,707,629,100.00**	**92.42**	**0.00**
5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1,242,699,600.00**	**1,122,632,700.00**	**90.34**	**0.00**
5.1.02.	**Belanja Barang dan Jasa**	**1,242,699,600.00**	**1,122,632,700.00**	**90.34**	**0.00**
5.1.02.01.	**Belanja Barang**	**584,150,504.00**	**547,537,604.00**	**93.73**	**0.00**
5.1.02.01.01.	**Belanja Barang Pakai Habis**	**584,150,504.00**	**547,537,604.00**	**93.73**	**0.00**
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	80,371,250.00	80,371,250.00	100.00	0.00
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	104,215,740.00	102,558,100.00	98.40	0.00
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1,426,000.00	306,200.00	21.47	0.00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	19,000,700.00	18,144,150.00	95.49	0.00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	68,265,220.00	67,213,100.00	98.46	0.00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13,228,000.00	13,228,000.00	100.00	0.00

5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	143,099,604.00	142,649,604.00	99.72	0.00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3,330,000.00	3,330,000.00	100.00	0.00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	34,570,000.00	34,570,000.00	100.00	0.00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	44,845,350.00	44,845,350.00	100.00	0.00
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	3,107,000.00	3,107,000.00	100.00	0.00
5.1.02.01.01.0043.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	253,440.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.01.01.0045.	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	15,894,032.00	4,248,650.00	26.73	0.00
5.1.02.01.01.0055.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	48,458,080.00	28,838,800.00	59.51	0.00
5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00	0.00
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	986,000.00	986,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.	**Belanja Jasa**	**383,961,025.00**	**334,021,025.00**	**86.99**	**0.00**
5.1.02.02.01.	**Belanja Jasa Kantor**	**318,161,025.00**	**268,221,025.00**	**84.30**	**0.00**
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	37,650,000.00	5,050,000.00	13.41	0.00
5.1.02.02.01.0010.	Honorarium Tim Pengurusan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	9,540,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penunjang Prasarana dan Sarana Umum	34,600,000.00	34,600,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	6,300,000.00	6,300,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	51,200,000.00	51,200,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Keberuntun	4,200,000.00	4,200,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	21,903,500.00	21,903,500.00	100.00	0.00
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	491,500.00	391,500.00	79.65	0.00
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.01.0048.	Belanja Jasa Kontribusi Asestasi	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	2,034,000.00	2,034,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	85,398,225.00	85,398,225.00	100.00	0.00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	48,242,800.00	48,242,800.00	100.00	0.00
5.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	2,901,000.00	2,901,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.04.	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**36,150,000.00**	**36,150,000.00**	**100.00**	**0.00**
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	11,350,000.00	11,350,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	23,400,000.00	23,400,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.12.	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**	**29,650,000.00**	**29,650,000.00**	**100.00**	**0.00**
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	29,650,000.00	29,650,000.00	100.00	0.00
5.1.02.03.	**Belanja Pemeliharaan**	**14,211,066.00**	**14,211,066.00**	**100.00**	**0.00**
5.1.02.03.03.	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**14,211,066.00**	**14,211,066.00**	**100.00**	**0.00**
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	14,211,066.00	14,211,066.00	100.00	0.00
5.1.02.04.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**260,377,005.00**	**226,863,005.00**	**87.13**	**0.00**
5.1.02.04.01.	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**260,377,005.00**	**226,863,005.00**	**87.13**	**0.00**
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	221,558,605.00	203,794,605.00	91.98	0.00

5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38,018,400.00	23,068,400.00	59.43	0.00
5.2.	**BELANJA MODAL**	**604,993,500.00**	**584,996,400.00**	**96.69**	**0.00**
5.2.02.	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**414,662,100.00**	**394,665,000.00**	**95.18**	**0.00**
5.2.02.05.	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**223,647,100.00**	**203,650,000.00**	**91.06**	**0.00**
5.2.02.05.01.	**Belanja Modal Alat Kantor**	**87,250,000.00**	**87,250,000.00**	**100.00**	**0.00**
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	87,250,000.00	87,250,000.00	**100.00**	0.00
5.2.02.05.02.	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**	**136,397,100.00**	**116,400,000.00**	**85.34**	**0.00**
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	62,400,000.00	62,400,000.00	**100.00**	0.00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	73,997,100.00	54,000,000.00	**72.98**	0.00
5.2.02.08.	**Belanja Modal Alat Laboratortum**	**2,200,000.00**	**2,200,000.00**	**100.00**	**0.00**
5.2.02.08.03.	**Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah**	**2,200,000.00**	**2,200,000.00**	**100.00**	**0.00**
5.2.02.08.03.0014.	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	2,200,000.00	2,200,000.00	**100.00**	0.00
5.2.02.10.	**Belanja Modal Komputer**	**188,815,000.00**	**188,815,000.00**	**100.00**	**0.00**
5.2.02.10.01.	**Belanja Modal Komputer Unit**	**168,440,000.00**	**168,440,000.00**	**100.00**	**0.00**
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	168,440,000.00	168,440,000.00	**100.00**	0.00
5.2.02.10.02.	**Belanja Modal Peralatan Komputer**	**20,375,000.00**	**20,375,000.00**	**100.00**	**0.00**
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	20,375,000.00	20,375,000.00	**100.00**	0.00
5.2.05.	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	**190,331,400.00**	**190,331,400.00**	**100.00**	**0.00**
5.2.05.01.	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan**	**190,331,400.00**	**190,331,400.00**	**100.00**	**0.00**
5.2.05.01.01.	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak**	**190,331,400.00**	**190,331,400.00**	**100.00**	**0.00**
5.2.05.01.01.001.	Belanja Modal Buku Umum	190,331,400.00	190,331,400.00	**100.00**	0.00
	SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM PEMBIAYAAN	**0.00**	**15,769,964.00**	**0.05**	**0.00**

Kepulauan Riau, 25 Mei 2026
Mengetahui
Pejabat Pelaksana Anggaran

ERNAWATI M, S.Pd
Pembina Tk I (III d)
197703162005012000.00

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 1 BINTAN TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2.1	0.00	0.00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.2.2	0.00	0.00
3	Subtotal (1-2)		0.00	0.00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	7.5.2.3	15,769,964.00	0.00
5	Subtotal (3+4)		15,769,964.00	0.00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		1,948,000.00	0.00
7	Lain-lain		0.00	0.00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	7.5.2.6	17,717,964.00	0.00

Bintan, 25 Mei 2026
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

SUBIATI M, S.Pd
Penata Tk I/III d
197703162005012006

C. NERACA

PEMERINTAH KOTA KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 1 BINTAN TIMUR
NERACA (BLUD)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	**ASET**	**1.1.**	**8,546,703,574.15**	**0.00**
2	**ASET LANCAR**	**1.1.1.**	**20,217,601.00**	**0.00**
3	Kas di Bendahara Penerimaan	1.1.1.00.	0.00	0.00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.1.1.01.	0.00	0.00
5	Kas di BLUD	1.1.1.02.	17,717,964.00	0.00
6	Kas Dana BOS	1.1.1.03.	0.00	0.00
7	Kas Dana P2SP	1.1.1.04.	0.00	0.00
8	Kas Lainnya Setara Kas	1.1.1.05.	2,499,637.00	0.00
9	Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum	1.1.1.06.	0.00	0.00
10	Piutang Pajak	1.1.1.07.	0.00	0.00
11	Piutang Retribusi	1.1.1.08.	0.00	0.00
12	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.08.	0.00	0.00
13	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.09.	0.00	0.00
14	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.1.10.	0.00	0.00
15	Belanja dibayar dimuka	1.1.1.11.	0.00	0.00
16	Piutang Lainnya	1.1.1.12.	0.00	0.00
17	Persediaan Badan Layanan Umum	1.1.1.13.	0.00	0.00
18	Aset Untuk Dikonsolidasikan	1.1.1.14.	0.00	0.00
	Jumlah ASET LANCAR		20,217,601.00	0.00
19	**ASET TETAP**	**1.1.2.**	**8,516,985,973.15**	**0.00**
20	Tanah	1.1.2.01.	400,000,000.00	0.00
21	Peralatan dan Mesin	1.1.2.02.	4,322,891,400.00	0.00
22	Gedung dan Bangunan	1.1.2.03.	2,674,976,500.00	0.00
23	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.1.2.04.	181,000,000.00	0.00
24	Aset Tetap Lainnya	1.1.2.05.	1,311,886,730.00	0.00
25	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.1.2.06.	0.00	0.00
26	Akumulasi Penyusutan	1.1.2.07.	(373,768,656.85)	0.00
	Jumlah ASET TETAP		8,516,985,973.15	0.00
27	**PIUTANG JANGKA PANJANG**	**1.1.3.**	**0.00**	**0.00**
28	Tagihan Penjualan Angsuran	1.1.3.01.	0.00	0.00
29	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	1.1.3.02.	0.00	0.00

30	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.3.03.	0.00	0.00
	Jumlah PIUTANG JANGKA PANJANG		0.00	0.00
31	**ASET LAINNYA**	**1.1.4.**	**9,500,000.00**	**0.00**
32	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.1.4.01.	0.00	0.00
33	Dana Kelolaan	1.1.4.02.	0.00	0.00
34	Aset yang dibatasi Penggunaannya	1.1.4.03.	0.00	0.00
35	Aset Tak Berwujud	1.1.4.04.	0.00	0.00
36	Aset Lain - Lain	1.1.4.05.	9,500,000.00	0.00
37	Akumulasi Amortisasi	1.1.4.06.	0.00	0.00
	Jumlah ASET LAINNYA		9,500,000.00	0.00
	JUMLAH ASET		8,546,703,574.15	0.00
38	**KEWAJIBAN**	**1.2.**	**2,499,637.00**	**0.00**
39	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**1.2.1.**	**2,499,637.00**	**0.00**
40	Utang Usaha	1.2.1.01.	0.00	0.00
41	Utang Pihak Ketiga	1.2.1.02.	0.00	0.00
42	Utang Pajak	1.2.1.03.	2,499,637.00	0.00
43	Utang Kepada KUN	1.2.1.04.	0.00	0.00
44	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.2.1.05.	0.00	0.00
45	Belanja yang masih harus dibayar	1.2.1.06.	0.00	0.00
46	Pendapatan Diterima Dimuka	1.2.1.07.	0.00	0.00
47	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.2.1.08.	0.00	0.00
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		2,499,637.00	0.00
48	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**1.2.2.**	**0.00**	**0.00**
49	Utang Jangka Panjang	1.2.2.01.	0.00	0.00
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0.00	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN		2,499,637.00	0.00
50	**EKUITAS**	**1.3.**	**8,544,203,937.15**	**0.00**
51	**EKUITAS**	**1.3.1.**	**8,544,203,937.15**	**0.00**
52	Ekuitas	1.3.1.01.	8,544,203,937.15	0.00
	Jumlah EKUITAS		8,544,203,937.15	0.00
	JUMLAH EKUITAS		8,544,203,937.15	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		8,546,703,574.15	0.00

Bintan, 25 Mei 2026
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 1 BINTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

SUSTATI M. S.Pd
Pembina Tk I/III d
197703162005012006

D. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KOTA KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 1 BINTAN TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL (BLUD)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	**PENDAPATAN**				
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	8,415,800.00	0.00	8,415,800.00	100.00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama	17,560,000.00	0.00	17,560,000.00	100.00
5	Pendapatan Hibah	119,797,084.00	0.00	119,797,084.00	100.00
6	Pendapatan Usaha Lainnya	63,264.00	0.00	63,264.00	100.00
7	Pendapatan APBN/ APBD	1,697,360,000.00	0.00	1,697,360,000.00	100.00
	Jumlah PENDAPATAN	**1,843,196,148.00**	**0.00**	1,843,196,148.00	100.00
8	**BEBAN**				
9	Beban Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Beban Persediaan	594,545,504.00	0.00	594,545,504.00	100.00
11	Beban Jasa	248,186,000.00	0.00	248,186,000.00	100.00
12	Beban Pemeliharaan	14,211,066.00	0.00	14,211,066.00	100.00
13	Beban Langganan Daya dan Jasa	135,675,025.00	0.00	135,675,025.00	100.00
14	Beban Perjalanan Dinas	248,815,089.00	0.00	248,815,089.00	100.00
15	Beban Penyusutan Aset	573,768,656.85	0.00	573,768,656.85	100.00
16	Beban Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah BEBAN	**1,815,201,340.85**	**0.00**	1,815,201,340.85	100.00
	Surplus/Defisit Operasional	**27,994,807.15**	**0.00**	27,994,807.15	100.00
17	**KEGIATAN NON OPERASIONAL**				
18	Surplus/ Defisit Penjualan Aset Nonlancar	0.00	0.00	0.00	0.00
19	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Surplus/Defisit Dari KEGIATAN NON OPERASIONAL	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
	Surplus/Defisit Sebelum POS LUAR BIASA	**27,994,807.15**	**0.00**	27,994,807.15	100.00
21	**POS LUAR BIASA**				
22	Pendapatan Luar Biasa	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Beban Luar Biasa	0.00	0.00	0.00	0.00

	Jumlah POS LUAR BIASA	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
	Surplus/Defisit-LO	**27,994,807.15**	**0.00**	27,994,807.15	100.00

Bintan, 25 Mei 2026

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

SRIYATATI M. S.Pd
Penata Tk I/III d
197703162005012006



E. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 1 BINTAN TIMUR
LAPORAN ARUS KAS (BLUD)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	**Arus Masuk Kas**		
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	8,415,800.00	0.00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0.00	0.00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	17,568,000.00	0.00
6	Pendapatan Hibah	0.00	0.00
7	Pendapatan APBN/APBD	1,697,360,000.00	0.00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	62,264.00	0.00
	Jumlah Arus Masuk Kas	1,723,399,064.00	0.00
9	**Arus Keluar Kas**		
10	Pembayaran Pegawai	0.00	0.00
11	Pembayaran Barang dan Jasa	745,883,604.00	0.00
12	Pembayaran Pemeliharaan	14,211,066.00	0.00
13	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	135,675,025.00	0.00
14	Pembayaran Perjalanan Dinas	226,863,005.00	0.00
15	Pembayaran Bunga	0.00	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas	1,122,632,700.00	0.00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi	600,766,364.00	0.00
16	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
17	**Arus Masuk Kas**		
18	Penjualan atas Tanah	0.00	0.00
19	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0.00	0.00
20	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0.00	0.00
21	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00
22	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00
23	Penjualan Aset Lainnya	0.00	0.00
24	Penerimaan dari Divestasi	0.00	0.00
25	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0.00	0.00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0.00	0.00
26	**Arus Keluar Kas**		
27	Perolehan Tanah	0.00	0.00

28	Perolehan Peralatan dan Mesin	394,665,000.00	0.00
29	Perolehan Gedung dan Bangunan	0.00	0.00
30	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00
31	Perolehan Aset Tetap Lainnya	190,331,400.00	0.00
32	Perolehan Aset Lainnya	0.00	0.00
33	Pengeluaran Penyertaan Modal	0.00	0.00
34	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0.00	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas	584,996,400.00	0.00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(584,996,400.00)	0.00
35	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**		
36	**Arus Masuk Kas**		
37	Penerimaan Pinjaman	0.00	0.00
38	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0.00	0.00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0.00	0.00
39	**Arus Keluar Kas**		
40	Pembayaran Pokok Pinjaman	0.00	0.00
41	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0.00	0.00
42	Penyetoran ke Kas Negara	(1,948,000.00)	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas	(1,948,000.00)	0.00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	1,948,000.00	0.00
43	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**		
44	**Arus Masuk Kas**		
45	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2,499,637.00	0.00
	Jumlah Arus Masuk Kas	2,499,637.00	0.00
46	**Arus Keluar Kas**		
47	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0.00	0.00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	2,499,637.00	0.00
48	**Kenaikan/ Penurunan Kas BLU**	20,217,601.00	0.00
49	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLU**	0.00	0.00
50	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU**	20,217,601.00	0.00

Kepulauan Riau, 25 Mei 2026
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

SMKN 1 BINTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

NURYATI M. S.Pd
Penata Tk I/III d
197703162005012000.00

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 1 BINTAN TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (BLUD)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	RIFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Ekuitas Awal		0.00	0.00
2	Surplus/Defisit LO		27,996,807.15	0.00
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		8,516,209,130.00	0.00
4	Koreksi Nilai Persediaan		0.00	0.00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		0.00	0.00
6	Lain-lain		1,948,000.00	0.00
7	Ekuitas Akhir		8,544,203,937.15	0.00

Bintan, 25 Mei 2026
Mengetahui
Kasubbag Perencana Anggaran



[illegible] ATI M.S.Pd
Penata Tk I/III d
19770316200501200[illegible]

I. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Laporan Keuangan BLUD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran ;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan BLUD.
Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala BLUD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan,

serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan BLUD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SMK Negeri 1 Bintan Timur Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan RiauTahun 2025.

17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur Tahun 2025, adalah tanggungjawab sepenuhnya BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur, dalam hal ini adalah Pimpinan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur.

1.4 Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (*Subsequent Event*) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur tahun 2026. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2026.

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur
- 1.4 Periode Pelaporan Keuangan
- 1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Profil BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur.
- 2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur
- 2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur tahun 2025

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Asumsi dasar Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- 4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja
- 4.7 Kebijakan Akuntansi Kas
- 4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan
- 4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- 4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Neraca

5.4 Laporan Operasional
5.5 Laporan Arus Kas
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
5.7 Catatan Atas Laporan Keuangan
Bab VI Penjelasan atas informasi – Informasi non Keuangan
6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan
Bab VII Penutup

BAB II

PROFIL BLUD SMK NEGERI 1 BINTAN TIMUR

2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur.

Data Tenaga Pendidik SMK Negeri 1 Bintan Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	TENAGA PENDIDIK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN			JUMLAH
		S-1	S-2	S-3	
1	Kelompok A (Wajib)	19	2	0	21
2	Kelompok B (Wajib)	9	1	0	10
3	Kelompok C (Peminatan) C1 – Dasar Bidang Keahlian	5	0	0	5
4	Bimb ingan Konseling	2	0	0	2
	C2 – Dasar Program Keahlian & C3- Kompetensi Keahlian				
5	Perhotelan	7	0	0	7
6	Akuntansi Dan Keuangan	5	1	0	6
7	Desain dan Produksi Busana	4	0	0	4
8	Rekayasa Perangkat Lunak	1	2	0	3
9	Desain Komunikasi Visual	1	0	0	1
JUMLAH		53	6	0	59

Data Tenaga Kependidikan SMK Negeri 1 Binatn Timur Tahun 2025 sebagai berikut :

No.	Tenaga Kependidikan	PNS	Non PNS	JML
1	Kepala Tata Usaha	1	0	1
2	Tenaga Teknis Keuangan	0	0	0
3	Tenaga Administrasi Kesiswaan	1	0	1
4	Tenaga Administrasi Persuratan/kearsipan	1	0	1
5	Tenaga Teknis Pengurus barang	1	0	1
6	Tenaga Teknis Dapodik	1	0	1

7	Tenaga Kebersihan	0	0	0
8	Security	0	0	0
Jumlah Tenaga Kependidikan		5	0	5

Data Peserta didik SMK Negeri 1 Bintan Timur tahun 2025/2026 adalah sebagai berikut :

No.	Kompetensi Keahlian	X	XI	XII	Jumlah
1	Perhotelan	120	92	95	307
2	Akuntansi dan keuangan	122	101	72	295
3	Desain dan Produksi Busana	24	26	11	61
4	Rekayasa Perangkat Lunak	83	65	65	213
5	Desain Komunikasi Visual	45	33	22	100
Jumlah					976

BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten serta tenaga ahli yang mendukung pelaksanaan *Teaching Factory (TEFA)*. SDM yang tersedia meliputi:

1. Tenaga Pendidik (Guru Produktif dan Normatif):
   - Guru bersertifikasi keahlian industri sesuai bidang kompetensi.
   - Guru mata pelajaran umum yang mendukung kurikulum berbasis kompetensi.
   - Instruktur dari dunia industri yang terlibat dalam program pelatihan siswa.
2. Tenaga Kependidikan:
   - Staf administrasi yang mengelola keuangan dan operasional BLUD.
   - Teknisi laboratorium dan bengkel untuk mendukung kegiatan praktik.
3. Kemitraan dengan Industri:
   - Mengundang praktisi industri sebagai instruktur tamu.
   - Menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk program magang dan penyerapan tenaga kerja.
   - Mengembangkan skema sertifikasi kompetensi yang diakui dunia usaha dan industri.

Sebagai SMK BLUD yang berbasis *Teaching Factory* (TEFA) dan Unit Produksi (UP), sekolah telah memiliki berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran berbasis produksi dan layanan industri, di antaranya:

1. Ruang Kelas dan Laboratorium:
   - Ruang kelas untuk pembelajaran teori.
   - Laboratorium komputer untuk simulasi bisnis digital dan desain grafis.
   - Perpustakaan sebagai pusat referensi dan literasi siswa.
2. Workshop dan Bengkel TEFA / UP:
   - Tefa Faiza Laundry sebagai tempat praktik mata pelajaran Laundry.

- Tefa Sembang Coffe Shop sebagai tempat praktik mata pelajaran Food and Baverage.
- Tefa Fashionnova sebagai tempat praktik menjahit.
- Tefa Skansa Tech Solution sebagai tempat praktik konsentrasi RPL.
- Tefa Vibes Desain sebagai tempat praktik konsentrasi DKV.
- Tefa ACC Production sebagai tempat praktik konsentrasi akuntansi.

3. Fasilitas Pendukung:
   - Ruang pemasaran produk hasil Teaching Factory di setiap konsentrasi keahlian.
   - Area publik seperti kantin dan koperasi sekolah yang dikelola oleh siswa.

Sebagai BLUD, SMK memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan Teaching Factory. Sumber dana sekolah berasal dari:

1. Dana BOS dan APBD:
   - Digunakan untuk operasional sekolah serta pengadaan bahan ajar dan alat praktik.
2. Pendapatan dari Unit Usaha TEFA:
   - Hasil penjualan produk dari unit Teaching Factory.
   - Jasa layanan seperti Coffe Shop, Laundry, Servis dan instal computer, ,desain grafis dan jasa menjahit.
   - Kerjasama dengan pihak lain, seperti penyewaan kantin dan aula.
3. Bantuan dari Pemerintah dan Swasta:
   - Hibah atau bantuan dari pemerintah untuk pengembangan kurikulum dan fasilitas.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur

Konsep strategi tidak hanya mempunyai nilai yang amat berharga bagi organisasi yang mengejar keuntungan, tapi juga bagi organisasi pemerintah atau publik. Terlebih organisasi pemerintah dalam membuat keputusan-keputusan penting yang selalu dituntut untuk *strategically effective* (Koteen dalam Salusu, 2006:39). Karakteristik yang unik dari organisasi pemerintah justru menunjukkan kebutuhan yang semakin besar terhadap pemanfaatan manajemen dan perencanaan strategi. Perencanaan strategi dapat menolong organisasi pemerintah untuk menangani perubahan lingkungan yang signifikan. Selain itu, dengan meningkatkan kemampuan untuk berpikir dan bertindak strategi, organisasi pemerintah dapat memberikan pelayanan terhadap kesejahteraan umum dengan efektif.

SMK Negeri 1 Bintan Timur adalah UPT-Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (menuju PPK-BLUD) dalam bidang layanan Pendidikan merupakan organisasi Pemerintah dimana dalam setiap kegiatannya dituntut bertindak strategis dalam memberikan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat.

A. Analisis SWOT

Analisis atas tantangan yang dihadapi dan peluang bagi pengembangan layanan Pendidikan di SMK Negeri 1 Bintan Timur memerlukan analisis atas kondisi internal dan eksternal. Untuk itu diperlukan analisis atas kekuatan (*Strength*), kelemahan(*Weakness*), peluang (*Opportunity*), tantangan (*Threat*), atau analisis SWOT atas kondisi pendidikan di SMK Negeri 1 Bintan Timur yang pada dasarnya merupakan gambaran tentang kinerja layanan SMK Negeri 1 Bintan Timur.

Faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan (*Strength*) dalam upaya pengembangan layanan di SMK Negeri 1 Bintan Timur adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya pendanaan yang besar untuk pengembangan program-program layanan pendidikan beserta realisasinya, sejalan dengan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengalokasikan 20% dari APBD, ditambah dengan pendanaan yang besar pula bersumber dari APBN;
2. Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh SMK Negeri 1 Bintan Timur sangat memadai, dengan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan untuk menjalankan pekerjaan berdasarkan tupoksi organisasi, dilengkapi dengan kualifikasi akademik dan keterampilan yang sesuai bagi upaya pengembangan layanan pendidikan;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sebagai faktor pendukung bagi pengembangan program-program layanan pendidikan;
4. Tersedianya sarana pembelajaran berbasis produk (barang/jasa) melalui *Teaching Factory* pada semua kompetensi keahlian untuk menghasilkan tamatan yang kompeten sesuai kebutuhan industri.
5. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan organisasi yang mampu menciptakan budaya kerja yang produktif dan iklim organisasi yang kondusif di lingkungan SMK Negeri 1 Bintan Timur;
6. Penguasaan dan penerapan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang mampu meningkatkan produktivitas sumber daya manusia di lingkungan SMK Negeri 1 Bintan Timur;
7. Ketersedian lingkungan industri pariwisata yang mendukung di Kabupaten Bintan;

Faktor-faktor internal yang menjadi kelemahan *(weakness)* dalam upaya pengembangan layanan pendidikan di SMK Negeri 1 Bintan Timur adalah sebagai berikut:

1. Pemerataan penempatan dan alokasi sumberdaya manusia pada berbagai Kompetensi keahlian masih kurang karena tidak ada penerimaan pegawai negeri sipil dan masih menghandalkan pendidik honorer atau pendidik tidak tetap, mengakibatkan adanya perbedaan produktivitas dan hasil kerja pada masing-masing kompetensi keahlian di lingkungan SMK Negeri 1 Bintan Timur.
2. Intensitas komunikasi dan kerjasama antar kompetensi keahlian masih memerlukan peningkatan terutama terkait dengan implementasi program sekolah yang pelaksanaannya membutuhkan kerjasama dan kebersamaan antar kompetensi keahlian;
3. Pengembangan program kerja tahunan masih belum mengacu pada perencanaan strategis jangka menengah, mengakibatkan kontinuitas dan keberlanjutan program dari tahun ke tahun sesuai dengan rencana jangka menengah kurang tercapai dan mampu mengantisipasi perkembangan yang berlangsung di masyarakat;
4. Pada beberapa implementasi program masih dijumpai kurangnya kejelasan dan ketegasan dalam pelimpahan wewenang dari tingkat pimpinan kepada bawahan, serta kekurangsesuaian penunjukan bidang atau sub bagian untuk melaksanakan program-program kerja yang dilaksanakan;
5. Masih ada ruang yang lokasi ruangnya dilantai 1 dengan lokasi ruang dilantai 2, yaitu Ruang Tenaga Pendidik dilantai 1 dan tenaga Kependidikan (Tendik) di lantai 2. Kondisi ini tentu berpengaruh pada efektivitas koordinasi dan pemberian

layanan kepada tenaga pendidik dan kependidikan di SMK Negeri 1 Bintan Timur.

Faktor-faktor eksternal yang merupakan peluang (*opportunity*) dalam upaya pengembangan layanan pendidikan di SMK Negeri 1 Bintan Timur adalah sebagai berikut:

1. Makin meningkatnya kebutuhan, kesadaran dan perhatian masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai faktor penentu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan harapan untuk meraih keberhasilan di masa depan;
2. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Bintan, serta perkembangan sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat, menumbuhkembangkan kebutuhan akan sumberdaya manusia dengan pengetahuan dan keterampilan yang beragam, dan pada gilirannya meningkatkan perluasan kebutuhan akan jasa layanan pendidikan;
3. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan, sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan akan pendidikan di kalangan masyarakat. Lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat makin meningkat keberagaman maupun kualitasnya;
4. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak yang positif bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan dan pelaksaaan pendidikan di SMK Negeri 1 Bintan Timur. Berbagai riset dalam bidang pendidikan telah membawa peningkatan kualitas pendidikan melalui temuan-temuan inovatif dalam praktek pembelajaran. Selain itu pemanfaatan teknologi dalam praktek pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Faktor-faktor eksternal yang merupakan tantangan (*threat*) dalam upaya pengembangan layanan pendidikan di SMK Negeri 1 Bintan Timur adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan kebutuhan masyarakat atas layanan pendidikan baik dari sisi kuantitas dan kualitas yang makin meningkat, serta makin meningkatnya sikap kritis masyarakat atas berbagai kebijakan dan implementasi program-program pendidikan, memerlukan kepekaan untuk memahami dinamika perkembangan;
2. Arah kebijakan yang kurang menentu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengakibatkan banyak perubahan keputusan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, dan pengembangan serta implementasi program yang terkesan kurang mengacu pada perencanaan jangka menengah dan bersifat parsial kurang memiliki keterkaitan yang komprehensif dengan visi dan misi yang telah dikembangkan. Hal inimemerlukan fleksibilitas dan tanggapan yang cepat untuk memvasilitasi pelaksanaannya di SMK Negeri 1 Bintan Timur, dan seringkali menganggu kontinyuitas implementasi program dan pelaksanaan kerja yang dikembangkan di SMK Negeri 1 Bintan Timur.

Analisis SWOT yang terlihat di atas, memberikan alternatif strategi yang tepat bagi SMK Negeri 1 Bintan Timur. Analisis tersebut memperlihatkan gambaran strategi menyeluruh bagi SMK Negeri 1 Bintan Timur yang didasarkan pada kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Dengan demikian, dapat disusun rumusan strategi SMK Negeri 1 Bintan Timur yang dapat dilakukan.

B. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan Kepulauan Riau tahun 2021-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan di Kabupaten/Kota, berkaitan dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang menjadi penjabaran visi dan misi pembangunan di Kepulauan Riau terhadap sasaran-sasaran yang dimaksud telah dirumuskan pada naskah RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026, menunjukkan adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan. Kebutuhan tersebut mencakup sarana dan prasarana pendidikan,pendidik dan tenaga kependidikan, pendanaan, dan tata Kelola.

Seperti telah diungkapkan dalam RPJMD Kepulauan Riau 2022-2026 Tabel V.1, seperti yang tercantum dalam BAB III Renstra, terdapat 3 (tiga) sasaran pembangunan pendidikan di Kepulauan Riau. Ketiga sasaran pembangunan pendidikan tersebut dijabarkan dari rumusan misi pembangunan pertama, yaitu: Meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan aksesibilitas pendidikan menengah atas 2. Peningkatan mutu pendidikan 3. Peningkatan kualitas keterampilan dan profesionalisme tenaga kerja/pencari kerja melalui sertifikasi profes. Dan berdasarkan 7 (tujuh) arah kebijakan pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, maka SMK Negeri 1 Bintan Timur menentukan arah strategi dan kebijakannya periode 2024 – 2028 sebagai berikut :

Arah strategi yang dilakukan SMK Negeri 1 Bintan Timur:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Meningkatkan kuantitas tamatan yang mempunyai daya saing di DU/DI;
3. Meningkatkan kompetensi keahlian siswa yang mampu menjadi tenaga kerja trampil siap kerja, berwirausaha, ataupun melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
4. Meningkatkan potensi sekolah yang bernuansa industri melalui *Teaching Factory* pada semua kompetensi keahlian sebagai sarana pembelajaran berbasis produk (barang/jasa) untuk menghasilkan tamatan yang kompeten sesuai kebutuhan industri;
5. Meningkatkan fungsi sekolah sebagai Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kejuruan Terpadu (PPKT) kepada masyarakat;
6. Meningkatkan fungsi sekolah sebagai Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kejuruan Terpadu (PPKT) kepada masyarakat;
7. Meningkatkan Kualitas Lingkungan yang aman, nyaman, indah dan kondusif;
8. Perluasan dan pemerataan akses Pendidikan menengah bermutu yang bekesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/dunia industri;
9. Penguatan pengelolaan sistem manajemen dalam pengawasan internal;
10. Pengembangan jiwa kewirausahaan melalui unit produksi yang ada di sekolah sesuai dengan kompetensi keahlian masing- masing.

Sedangkan arah kebijakan SMK Negeri 1 Bintan Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah Kompetensi keahlian sebagai upaya penyediaan tenaga kerja;

2. Meningkatkan jumlah ruang pembelajaran umum sebagai upayapenambahan kompetensi keahlian;
3. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik untuk menghasilkan tamatanyang kompeten;
4. Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan sebagai upaya pelayananpada tenaga pendidik dan siswa;
5. Meningktakan keterserapan tamatan di DU/DI;
6. Meningkatkan kompetensi keahlian siswa melalui uji LSP;
7. Meningkatkan Jumlah siswa yang berwirausaha;
8. Meningkatkan kompetensi siswa untuk melanjutkan ke jenjang yanglebih tinggi melalui pendampingan BK;
9. Meningkatkan Jumlah kompetensi keahlian yang pembelajaran berwirausahanya melalui teaching factory;
10. Meningkatkan Jumlah fasilitas ruang pelatihan yg dimanfaatkan oleh Masyarakat;
11. Meningkatkan Jumlah kegiatan pelatihan bagi Masyarakat;
12. Meningkatkan Luasan ruang terbuka hijau;

2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur.

Tabel Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur

No	Unit Teaching Factory (TEFA) / Kerjasama Pihak Lain / Pengembangan usaha	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Keterangan
1	**Tefa Sembang Cofffe Shop**	Restoran	3.000.000,00	2.658.650,00	88,62	Biaya produksi sedikit lebih rendah dari perkiraan
2	**Tefa Faiza Laundry**	Laundry pakaian	1.000.000,00	358.750,00	35,87	Realisasi menurun karena program tidak sesuai rencana
3	**Tefa Busana**	Jahit dan Permak Pakaian	4.000.000,00	1.251.700,00	31,29	Biaya produksi sedikit lebih rendah dari perkiraan
4	**Tefa RPL**	Print, Jilid dan Pembuatan Aplikasi	1.000.000,00	0,00	0,00	Produksi tidak berjalan dengan rencana
5	**Tefa DKV**	Mendesain pembuatan Mug dan Gantungan kunci	1.000.000,00	0,00	0,00	Produksi tidak berjalan dengan rencana
6	**Kantin Sekolah**	Penjualan makanan dan minumam	15.336.000,00	6.000.000,00	39,12	Biaya produksi sedikit lebih rendah dari perkiraan
7	**Pengembangan Usaha**	Pembuatan Pupuk Kompos dan Kegiatan PKK siswa	5.000.000,00	0,00	0,00	Produksi tidak berjalan dengan rencana

BAB III

INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja pada BLUD SMK, pada laporan keuangan ini digunakan sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat managemen yang digunakan untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran dan tujuan, untuk mewujudkan misi dan visi organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut akan disajikan data kinerja BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
A. Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa					
1	Persentase kelulusan siswa	100%	100%	100	siswa lulus seluruhnya
2	Rata-rata nilai Ujian Kompetensi Keahlian (UKK)	≥ 80	88,91	111	Mencapai target
3	Persentase siswa yang memperoleh sertifikasi kompetensi industry	10%	8%	80	Beberapa siswa belum lulus uji sertifikasi
4	Persentase lulusan yang bekerja sesuai kompetensi dalam 6 bulan	60%	59%	98	Hampir mencapai target, perlu peningkatan kemitraan
5	Persentase lulusan yang berwirausaha	10%	15%	150	Melebihi target, program wirausaha berjalan baik
B. Kinerja Keuangan dan Unit Usaha BLUD					
6	Persentase pendapatan unit usaha BLUD terhadap biaya operasional sekolah	1,5%	1%	67	Hampir mencapai target, strategi pemasaran perlu ditingkatkan
7	Efisiensi penggunaan dana BLUD sesuai rencana kerja	90%	95%	105	Anggaran terserap dengan baik dan efektif
C. Kinerja Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)					
8	Jumlah kerja sama aktif dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	2 mitra	0 mitra	0,00	Belum mencapai target, karena Tefa belum maksimal
9	Persentase siswa yang menjalani magang industry	100%	100%	100	Semua siswa telah menjalani magang
10	Jumlah produk atau jasa unggulan dari Teaching Factory (TEFA)	6 produk	4 produk	67	Ada dua produk yang belum terlaksana
D. Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan					

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
11	Kepuasan siswa dan orang tua terhadap layanan Pendidikan	85%	88%	103	Melebihi target berdasarkan survei internal
12	Jumlah guru produktif bersertifikasi industry	50%	17%	35	Belum mencapai target

Berdasarkan tabel pencapaian, secara keseluruhan SMK BLUD telah mencapai rata-rata 84,6% dari target yang ditetapkan. Beberapa indikator bahkan melebihi target, seperti wirausaha lulusand an kepuasan siswa. Namun, ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, seperti jumlah kerja sama aktif dengan dunia usaha dan dunia industry (DUDI), pencapaian sertifikasi kompetensi guru dan siswa serta pengembangan produk Teaching Factory. Untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memperkuat kemitraan dengan industri untuk meningkatkan jumlah lulusan yang bekerja sesuai kompetensi.
2. Optimalisasi pemasaran unit usaha BLUD untuk meningkatkan pendapatan sekolah.
3. Meningkatkan kesiapan siswa dalam uji sertifikasi industri melalui bimbingan tambahan.
4. Pengembangan produk Teaching Factory agar lebih kompetitif di pasar.

Dengan perbaikan strategi ini, diharapkan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur dapat mencapai 100% target di tahun mendatang.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Adapun hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target realisasi antara lain :

b. Hambatan dalam Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa

1. Kurangnya kesiapan siswa dalam ujian sertifikasi industri
   - Tidak semua siswa memiliki kesiapan yang cukup untuk lulus uji sertifikasi.
   - Kurangnya akses terhadap bahan ajar atau simulasi ujian sesuai standar industri.
2. Penyerapan lulusan ke dunia kerja belum optimal
   - Persaingan ketat di dunia kerja sehingga tidak semua lulusan langsung terserap.
   - Kurangnya pengalaman praktis yang relevan dengan kebutuhan industri.
   - Masih ada lulusan yang lebih memilih bekerja di luar bidang keahlian mereka.
   - Beberapa alumni mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan sesuai dengan keahliannya
   - Kurangnya DUDI yang sesuai dengan kompetensi keahlian lulusan

b. Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan dan Unit Usaha BLUD

1. Pendapatan unit usaha BLUD belum mencapai target

- Persaingan dengan produk atau jasa dari industri komersial yang lebih mapan.
- Kurangnya strategi pemasaran dan branding produk/jasa SMK BLUD.
- Keterbatasan modal untuk meningkatkan skala produksi dan inovasi produk.

2. Efisiensi penggunaan dana BLUD
   - Masih ada beberapa program yang belum berjalan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas.
   - Keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah atau sumber pendanaan lain.

c. Hambatan dalam Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)
1. Jumlah produk unggulan Teaching Factory belum optimal
   - Keterbatasan bahan baku atau alat produksi yang menyebabkan terhambatnya pengembangan produk baru.
   - Produk belum sepenuhnya sesuai standar pasar, sehingga masih butuh perbaikan dalam kualitas dan pemasaran.
2. Kemitraan industri masih perlu diperluas
   - Tidak semua industri bersedia menerima siswa magang karena keterbatasan kapasitas mereka.
   - Kurangnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja.

d. Hambatan dalam Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan
1. Tingkat kepuasan siswa dan orang tua belum maksimal
   - Beberapa siswa merasa materi pembelajaran masih kurang relevan dengan dunia kerja.
   - Orang tua belum sepenuhnya memahami konsep BLUD di SMK, sehingga kurang mendukung program sekolah.
2. Kurangnya jumlah guru bersertifikasi industri
   - Tidak semua guru memiliki kesempatan mengikuti pelatihan atau sertifikasi karena keterbatasan waktu dan biaya.
   - Masih ada kendala administratif dalam proses pengajuan sertifikasi guru ke lembaga industri terkait.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Akuntansi adalah BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur Provinsi Kepulauan Riau.

4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas;
b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur Provinsi Kepulauan Riau adalah:

a) ***Basis Kas*** untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam ***Laporan Realisasi Anggaran***
Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat Kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

b) ***Basis akrual*** untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam ***Neraca***
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

c) ***Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran*** berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riautidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

d) ***Basis akrual untuk neraca*** berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas;

4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengakuan dan pengukuran atas transaksi kejadian ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan ini adalah:

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.
   Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut.

Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD, adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur tahun 2025, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat Diterima pada Rekening Kas Umum. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum untuk seluruh transaksi setelah dilakukan pengesahan definitif bendahara. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

4.7 Kebijakan Akuntansi Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas secara umum diakui jika memenuhi kriteria:

a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.

4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari:

- Barang Konsumsi;
- Bahan untuk pemeliharaan;
- Suku cadang;
- Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
- Bahan baku;
- Barang dalam proses/setengah jadi;

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal; diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.

4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.

4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

BAB V

RINCIAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang telah disusun BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini:

5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan – LRA

Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp1.843.196.148,00 atau sebesar 99,76 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.847.693.100,00 sebagaimana ikhtisar sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	15.000.000,00	8.415.800,00	56,11	0,00
Pendapatan BLUD dari Hibah	119.997.100,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	15.336.000,00	17.560.000,00	114,5	0,00
Pendapatan BLUD dari APBD	1.697.360.000,00	1.697.360.000,00	100	0,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah (jasa giro) - jasa giro	0,00	63.264,00	0,00	0,00
TOTAL PENDAPATAN BLUD	**1.847.693.100,00**	**1,723,399,064.00**	**93.27**	**0,00**

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Tahun 2025 sebesar Rp8.415.800,00 atau 56,11% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp15,000,000.00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Tefa Perhotelan	4.000.000,00	4.512.800,00	113	0,00
Tefa Busana	4.000.000,00	3.740.000,00	93,5	0,00
Tefa RPL	1.000.000,00	163.000,00	16	0,00
Tefa DKV	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pengembangan usaha	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	**15.000.000,00**	**8.415.800,00**	**56,11**	**0,00**

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp119.997.100,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Hibah Banper Sekolah PK	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Hibah Kementerian Agama	19.997.100,00	0,00	0,00	0,00
Total Pendapatan BLUD dari Hibah	**119.997.100,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Tahun 2025 sebesar Rp17.560.000,00 atau 115,00%, dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp15.336.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Kantin 1	1.917.000,00	1.100.000,00	57	0,00
Kantin 2	1.917.000,00	2.400.000,00	125	0,00
Kantin 3	1.917.000,00	2.000.000,00	104	0,00
Kantin 4	1.917.000,00	2.300.000,00	120	0,00
Kantin 5	1.917.000,00	2.400.000,00	125	0,00
Kantin 6	1.917.000,00	2.560.000,00	134	0,00
Kantin 7	1.917.000,00	2.400.000,00	125	0,00
Kantin 8	1.917.000,00	2.400.000,00	125	0,00
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	**15.336.000,00**	**17.560.000,00**	**115**	**0,00**

iv)Pendapatan BLUD dari APBD

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD Tahun 2025 sebesar Rp1.697.360.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp1.697.360.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Dana BOSP	1.697.360.000,00	1.697.360.000,00	100	0,00
Total Pendapatan BLUD dari APBD	**1.697.360.000,00**	**1.697.360.000,00**	**100**	**0,00**

v)Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp63.264,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Jasa Giro	0,00	63.264,00	0,00	0,00
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	**0,00**	**63.264,00**	**0,00**	**0,00**

b. Belanja

1. Belanja Pegawai BLUD

Berupa Belanja Gaji & Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan BLUD dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0 % dari total anggaran belanja pegawai BLUD yang sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Pegawai BLUD	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp1.122.632.700,00 atau 90,34% dari total anggaran belanja barang dan jasa yang sebesar Rp1.242.699.600,00 dengan rincian sebagai berikut :.

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Barang	584.150.504,00	547.537.604,00	93,73
Belanja Jasa	383.961.025,00	334.021.025,00	86,99
Belanja Pemeliharaan	14.211.066,00	14.211.066,00	100
Belanja Langganan Daya dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	260.377.005,00	226.863.005,00	87,13
Total Belanja Barang dan Jasa BLUD	**1.242.699.600,00**	**1.122.632.700,00**	**90,34**

3. Belanja Modal BLUD

Belanja modal BLUD terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp584.996.400,00 atau 96.69% dari total anggaran belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use) sebesar Rp604.993.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Belanja Modal peralatan dan mesin	414.662.100,00	394.665.000,00	95.18	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap lainnya	190.331.400,00	190.331.400,00	100	0,00
Total Belanja Modal BLUD	**604.993.500,00**	**584.996.400,00**	**96.69**	**0,00**

5.2 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran L[ebih

1) Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo awal SAL pada tahun 2025 sebesar Rp0,00 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

2) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan digunakan dalam rangka membiayai defisit tahun anggaran berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

3) Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SiLPA tahun 2025 sebesar Rp15.769.964,00.

5.3 Neraca

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- Berupa kas/setara kas dan persediaan

Aset Lancar sebesar Rp 0,00 yang dimiliki BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur per 31 Desember 2025 terdiri dari:

a. Kas di Bendahara BLUD

Kas BLUD adalah semua bentuk penerimaan dan pengeluaran uang tunai atau setara kas yang dikelola oleh SMK Negeri 1 Bintan Timur dalam rangka menjalankan operasionalnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, dan pendapatan lainnya. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp17.717.964,00 dengan rincian :

Uraian	Jumlah (Rp)
Kas di Bank	
Rek Bank Penerimaan Norek. 135-01-00017 Riau Kepri Syariah	17.717.964,00
Rek Bank Pengeluaran Norek. 135-01-00017 Riau Kepri Syariah	0,00
Rek Banper PK Norek. 556601000046300 BRI	0,00
Kas Tunai	0,00
Total Kas di Bendahara BLUD	**17.717.964,00**

b. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan kas dibawah pengelolaan bendahara BOS yang bersumber dari pemerintah untuk mendukung operasional sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan tanpa membebani peserta didik. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BOS sebesar RP0,00 dengan rincian :

Uraian	Jumlah
Kas di Bank	0,00
Rek Bank Penerimaan Norek. 135-38-00129 Riau Kepri Syariah	0,00
Rek Bank Pengeluaran Norek. 135-38-00129 Riau Kepri Syariah	0,00
Kas Tunai	0,00
Total Kas di Bendahara BOS	0,00

c. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 terdiri dari :

Uraian	Jumlah
Persediaan Barang Habis Pakai	0,00
- Bahan	0,00
- Suku Cadang	0,00
Persediaan BarangTidak Habis Pakai	0,00
Total Persediaan	**0,00**

2. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh pelayanan umum. Aset tetap sebesar Rp8.516.985.973,15 per 31 Desember 2025 merupakan nilai perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan yang pengadaannya bersumber dari pengelolaan dana BOS dan dana SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dan BLUD.

a. Tanah

Nilai aset tanah BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur per 31 Desember 2025 sebesar Rp400.000.000,00 dan tidak terdapat penambahan aset tetap tanah selama tahun 2025.

b. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.322.891.400,00 meningkat sebesar Rp395.662.100,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp3.927.229.300,00.

Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**Rp3.927.229.300,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 414.662.100,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp0,00
- Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kementerian	Rp0,00
Total Penambahan	**Rp 414.662.100,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	Rp19.000.000
Total Pengurangan :	**Rp 19.000.000**
Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**Rp4.322.891.400,00**

c. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.874.976.500,00 tidak mengalami peningkatan jika dibandingkan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp2.874.976.500,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**Rp2.874.976.500,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp2.874.976.500,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp 0,00
- Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kementerian	Rp0,00
Total Penambahan	**Rp0,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel...Dst	Rp0,00
Total Pengurangan :	Rp0,00
Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**Rp2.874.976.500,00**

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur per 31 Desember 2025 sebesar Rp181.000.000,00 tidak mengalami peningkatan jika dibandingkan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 yang sebesar

Rp181.000.000,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**Rp181.000.000,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp0,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp0,00
- Hibah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kementerian	Rp0,00
Total Penambahan	**Rp0,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	Rp0,00
Total Pengurangan :	Rp0,00
Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**Rp181.000.000,00**

e. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Aset Tetap Lainnya BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.311.886.730,00 meningkat sebesar Rp190.331.400,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp1.121.555.330,00. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	**Rp1.121.555.330,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp190.331.400,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp0,00
- Hibah Aset Tetap Lainnya dari Kementerian	Rp0,00
Total Penambahan	**Rp190.331.400,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Lainnya	Rp0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	Rp0,00
Total Pengurangan :	**Rp0,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya	**Rp1.311.886.730,00**

3. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya dapat berupa Aset Tidak Berwujud dan Aset Rusak Berat/Tidak Digunakan Lagi dalam Operasional Kegiatan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Bintan

Timur. mencatat Aset Lainnya sebesar Rp9.500.000,00 terdiri dari Aset Tidak Berwujud (Software, dll) sebesar Rp9.500.000,00 dan Aset Rusak Berat/Tidak Digunakan Lagi dalam Operasional Kegiatan sebesar Rp0,00. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Lainnya	**Rp9.500.000,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Lainnya	Rp0,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp0,00
- Hibah Aset Lainnya dari Kementerian	Rp0,00
Total Penambahan	**Rp0,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Lainnya	Rp0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	Rp0,00
Total Pengurangan :	Rp0,00
Saldo Akhir Aset Lainnya	**Rp9.500.000,00**

4. Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur memiliki kewajiban berupa hutang pajak atas pembelian peralatan *(home use)* sebesar Rp2.499.637,00.

5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pada Tahun 2025 Ekuitas adalah sebesar Rp8.544.203.937,15.

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Ekuitas	**Rp0,00**
- Surplus/Defisit LO	Rp27.994.807,15
- Koreksi Ekuitas	Rp8.516.209.130,00
Saldo Ekuitas Akhir	**Rp8.544.203.937,15**

5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional
b) Beban dari kegiatan operasional
c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional

d) Pos luar biasa
e) Surplus/defisit LO

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional

Pendapatan LO dari kegiatan operasional terdiri dari :

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2025 sebesar Rp8.415.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan TEFA Perhotelan	4.512.800,00	0,00	0,00	4.512.800,00
Pendapatan TEFA Busana	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00
Pendapatan TEFA RPL	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
Pendapatan TEFA DKV	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengembangan Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO	**8.415.800,00**	**0,00**	**0,00**	**8.415.800,00**

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2025 sebesar Rp119.797.084,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Hibah Banper Sekolah PK	99.799.984,00	0,00	0,00	99.799.984,00
Hibah Kementerian Agama	19.997.100,00	0,00	0,00	19.997.100,00
Total Pendapatan BLUD dari Hibah LO	**119.797.084,00**	**0,00**	**0,00**	**119.797.084,00**

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO Tahun 2025 sebesar Rp17.560.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Kantin 1	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Kantin 2	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Kantin 3	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Kantin 4	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
Kantin 5	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Kantin 6	2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00
Kantin 7	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Kantin 8	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO	**17.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.560.000,00**

iv) Pendapatan BLUD dari APBD/APBN LO

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD LO Tahun 2025 sebesar Rp1.697.360.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Dana BOSP	1.697.360.000,00	0,00	0,00	1.697.360.000,00
Total Pendapatan BLUD dari APBD LO	**1.697.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.697.360.000,00**

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2025 sebesar Rp63.264,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Jasa Giro	63,264	0,00	0,00	63,264
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO	**63,264**	**0,00**	**0,00**	**63,264**

b) Beban dari kegiatan operasional

1. Belanja Pegawai BLUD LO

Berupa Beban Gaji & Tunjangan dan Beban Tambahan Penghasilan BLUD LO dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp0,00 rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Beban Pegawai BLUD	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Beban barang dan jasa LO tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.815.201.340,85 dengan rincian sebagai berikut :.

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Barang	594.545.504,00	0,00	0,00	594.545.504,00
Beban Jasa	383.861.025,00	0,00	0,00	383.861.025,00
Beban Pemeliharaan	14.211.066,00	0,00	0,00	14.211.066,00
Beban Perjalanan Dinas	248.815.089,00	0,00	0,00	248.815.089,00

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	573.768.656.85	0,00	0,00	573.768.656.85
Total Beban Barang dan Jasa BLUD	**1.815.201.340,85**	**0,00**	**0,00**	**1.815.201.340,85**

c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan dikelompokkan dalam kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur tahun 2025 sebesar Rp0,00.

d) Surplus/defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan beban. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur mencatat surplus/Defisit LO sebesar Rp27.994.807,15.

5.5 Laporan Arus Kas

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur. dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur pada Tahun 2025 sebesar Rp1.723.399.064,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	8.415.800,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Hibah	0,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	17.560.000,00	0,00
Pendapatan BLUD dari APBD	1.697.360.000,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	63.264,00	0,00

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	**1.723.399.064,00**	**0,00**

b. Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur selama Tahun 2025 sebesar Rp1.122.632.700,00 terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Belanja Barang dan Jasa	**745,883,604.00**	0,00
Belanja Pemeliharaan	14.211.066,00	0,00
Belanja Langganan Daya dan Jasa	135.675.025,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	**226,863,005.00**	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	**1.122.632.700,00**	**0,00**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp600,766,364.00 Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	600,766,364.00	0,00

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset Non-Keuangan lainnya.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan di masa yang akan datang.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur pada Tahun 2025 sebesar Rp0,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan Aset Tetap Tanah	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	**0,00**	**0,00**

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur pada Tahun 2025 sebesar Rp584,996,400.00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**394,665,000.00**	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	190.331.400,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	**584,996,400.00**	**0,00**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp(584,996,400.00). Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(584,996,400.00)	0,00

3) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas pergerakan uang masuk dan keluar yang berkaitan dengan sumber pendanaan jangka panjang, utang atau ekuitas yang mempengaruhi struktur permodalan sekolah.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari aktivitas Pendanaan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur pada Tahun 2025 sebesar Rp0,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari aktivitas Pendanaan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur pada Tahun 2025 sebesar Rp(1.948.000,00) yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Penyetoran ke Kas Negara	(1.948.000,00)	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	**(1.948.000,00)**	**0,00**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp1.948.000,00, Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	1.948.000,00	0,00

4) Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah Arus Kas yang merupakan mutasi kas non-anggaran yang bersifat sementara (transit), masuk dan keluar, yang tidak mempengaruhi anggaran (bukan operasi, investasi, pendanaan). Arus Kas tersebut mencakup penerimaan/pengeluaran PFK (Perhitungan Fihak Ketiga) seperti pajak, kiriman uang, dan uang persediaan.

c. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari aktivitas Transitoris BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur pada Tahun 2025 sebesar Rp2.499.637,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2.499.637,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	**2.499.637,00**	**0,00**

d. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari aktivitas Transitoris BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur pada Tahun 2025 sebesar Rp0,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	**0,00**	**0,00**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp2.499.637,00, Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	2.499.637,00	0,00

5) Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Periode 2025

Kenaikan/(penurunan) Kas Bersih Selama Periode Tahun 2025 merupakan akumulasi jumlah kenaikan/(penurunan) kas bersih dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris.

Selama Tahun Anggaran 2025 terjadi kenaikan/penurunan kas bersih sebesar Rp20.217.601,00 yang terdiri dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp600,766,364.00, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar -Rp584,996,400.00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Rp1.948.000,00, dan Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Sebesar Rp2.499.637,00. Perbandingan Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	20.217.601,00	0,00

6) Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025

Saldo akhir kas per 31 Desember 2025 merupakan perhitungan dari kenaikan/ (penurunan) kas bersih selama periode tahun 2025 dikurangi dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

Saldo akhir kas di BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.717.964,00 didapat dari kenaikan/penurunan kas bersih selama periode tahun 2025 sebesar Rp Rp20.217.601,00 dikurangi dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp2.499.637,00.

Total Saldo Kas BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur Per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.717.964,00 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
Kas di BLUD	17.717.964,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	**17.717.964,00**	**0,00**

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

a) Ekuitas awal
b) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti:
   1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
   2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas Akhir

a) Ekuitas Awal

Pada Tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur mencatat ekuitas awal sebesar Rp0,00 yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada laporan Tahun 2025. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jumlah Aset Tahun 2025 Rp0,00
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025 Rp0,00
- **Saldo Awal Ekuitas 2025** Rp0,00

b) Surplus/Defisit LO

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dalam Laporan Operasional Tahun 2025 tercatat sebesar Rp27.994.807,15.

c) Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar Rp8.544.203.937,15 merupakan saldo kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Total Aset dan Total Kewajiban BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur Tahun 2025.

- Jumlah Aset Tahun 2025 Rp8.546.703.574,15
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025 Rp2.499.637,00
- **Saldo Akhir Ekuitas 2025** **Rp8.544.203.937,15**

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No.1407 Tahun 2024

BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur beralamat di Jl.Korindo KM.22, Kelurahan Sungai Lekop.

6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nirlaba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di , dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur.

PENUTUP

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun sebagai bentuk tanggung jawab BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, penyusunan laporan keuangan BLUD juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Secara umum pencapaian kinerja atas sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik, namun begitu masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang masih harus terus dibenahi dan menjadi perhatian oleh BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur

Dengan memperhatikan strategisnya peran sekolah dan besarnya tantangan yang dihadapi untuk mendukung Visi Misi Pendidikan Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, SMK Negeri 1 Bintan Timur. Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja serta memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan industri. Melalui pendekatan berbasis kompetensi, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta pengelolaan keuangan yang transparan melalui sistem BLUD, sekolah ini berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan lulusan SMK dapat menjadi tenaga kerja yang unggul dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Akhir kata, BLUD SMK Negeri 1 Bintan Timur Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan dalam penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban kami dalam menyajikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

Bintan, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 1 BINTAN TIMUR.
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ERDATATI M, S.Pd.
Penata Tk 1/III d
Nip.197703162005012006

PT. BANK BIAN ASTRI SYARIAH
BEKI Pinlan

Kepada Yth :
[illegible]
BLUD UPT MUSEUM I DINTAR TINGGI
JALAN DIPONEGORO NO 22
KAB. DINTAR KEPULAUAN RIAU 29111 Indonesia

REKENING KORAN GIRO
Periode : 1/09/23 to 30/09/23

Valuta : IDR

Tgl.	Tx Kode	Keterangan Transaksi	No Trace	Mutasi	Saldo	User ID	Cabang
		Saldo Sebelumnya			00 CR		
4/09/23	1000	SETT ANAL BLUD UPT MUSEUM I DIN	01.30.42133	18,478,000.00 CR	18,478,000.00 CR	BEKO12654	122
26/09/23	1000	SETT PENDAPATAN/LAIL#BDL/003697	01.30.47814	1,978,000.00 CR	20,456,000.00 CR	BEKO11814	122
30/09/23	0100	DIST BAGI HASIL BAGI HASIL	00.30.01822	31,287.00 CR	20,487,287.00 CR	DC820	122

Mutasi Debet : 0 00 Mutasi Kredit : 3 20,487,287.00

Tanggal: 30/09/23

bksyariah

Mantap

PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH
KCKS Bintan

Kepada Yth :
1.350.100.019
BLUD SMK NEGERI 1 BINTAN TIMUR
JALAN KORINDO KM 22
KAB. BINTAN KEPULAUAN RIAU 29151 Indonesia

REKENING KORAN GIRO
Periode : 1/10/25 to 31/10/25

Halaman : 0001

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No Trace	Mutasi	Saldo	User ID	Cabang
		Saldo Sebelumnya			20,467,387.00 CR		
13/10/25	2000	ARCUITA451 CASH SUMIARSIH/OTHR	01.40.69629	[illegible] DR	15,467,387.00 CR	BRKV20604	125
31/10/25	1000	BIT PENDAPATAN BLUD BLN OKT/LA	01.42.51313	4,313,[illegible] CR	[illegible] CR	BRKH11016	192
31/10/25	0109	BIAT. BAGI HASIL BAGI HASIL	84.20.01646	14,440.00 CR	[illegible] CR	BCS21	125

Mutasi Debet : 1 5,000,000.00 Mutasi Kredit : 3 [illegible]

Tanggal, 31/10/25

brksyariah

PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH
BAKB Bintan

Kepada Yth :
1.320.100.017
BLUD SMK NEGERI 1 BINTAN TIMUR
JALAN KORINDO KM 22
KAB. BINTAN KEPULAUAN RIAU 29151 Indonesia

REKENING KORAN (CIF)
Periode : 1/11/25 to 30/11/25

Halaman : 0001

Tgl. Tx	Kode	Keterangan Transaksi	No Trace	Mutasi	Saldo	User ID	Cabang
		Saldo Sebelumnya			19,793,827.00 CR		
28/11/25	1000	PENYET PENDPTN BLUD UN NOV/LAI 01.45.46643		2,872,000.00 CR	22,667,827.00 CR	0000110835	100
28/11/25	0164	DIST. BAGI HASIL BAGI HASIL	90.10.01671	16,314.00 CR	22,684,141.00 CR	07529	125
		Mutasi Debet : 0	.00	Mutasi Kredit : 2		2,888,314.00	

Tanggal, 30/11/25

brksyariah

Kartal

PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH
BKS Bintan

Kepada Yth :
1.350.100.017
BLUD SMK NEGERI 1 BINTAN TIMUR
JALAN KORINDO KM 22
KAB. BINTAN KEPULAUAN RIAU 29151 Indonesia

REKENING KORAN 0180
Periode : 1/12/25 to 31/12/25

Halaman : 0001

Tgl. Tr	Kode	Keterangan Transaksi	No Trace	Mutasi	Saldo	UserID	Cabang
		Saldo Sebelumnya			22,684,181.00 CR		
08/12/25	0130	005376# BANTUAN PERSONIL PEL	48.60.13766	8,668,800.00 CR	31,352,981.00 CR	BRK012926	103
17/12/25	1004	LLG 0391 RPL 133 DB PENDIS	48.66.09881	19,997,100.00 CR	51,350,081.00 CR	BRK011557	100
23/12/25	2000	ABC0172452 CASH SUWIARSIH/PEMB	01.49.26913	6,000,000.00 DR	45,350,081.00 CR	BRK020654	135
23/12/25	2000	ABC0172454 CASH SUWIARSIH/BIAY	01.49.26873	19,997,100.00 DR	25,352,981.00 CR	BRK020654	135
23/12/25	2000	ABC0172453 CASH SUWIARSIH/BIAY	01.49.26819	8,668,800.00 DR	16,684,181.00 CR	BRK020654	135
30/12/25	1000	SET LAILATUL/BEND/SET PEND BLU	01.49.07196	282,000.00 CR	16,966,181.00 CR	BRK011835	100
30/12/25	1000	SET LAILATUL/BEND/SET SISA DAN	01.49.08263	730,900.00 CR	17,697,081.00 CR	BRK011835	100
31/12/25	0029	DIST. BAGI HASIL BAGI HASIL	11.00.01700	20,883.00 CR	17,717,964.00 CR	BCB31	135

Mutasi Debet : 3 34,665,900.00 Mutasi Kredit : 5 29,699,683.00

Tanggal, 31/12/25

Syariah

LAPORAN
KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SMK NEGERI 1 BINTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)



DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
KATA PENGANTAR vi
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB vii
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN viii
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH x
C. NERACA xi
D. LAPORAN OPERASIONAL xiv
E. LAPORAN ARUS KAS xvi
F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS xix
G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 2
1.3 Penangungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara 3
1.4 Periode Pelaporan Keuangan 3
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 3
BAB II POFIL BLUD SMK NEGERI 1 BINTAN UTARA
2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara 4
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 1 Binut 5
2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara 5
BAB III INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET
3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan TA 2025 6
3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realitas 6

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Akuntansi.....
4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan 9
4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 9
4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan laporan Keuangan..... 9
4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan 10
4.6 Kebijakan Akuntasni Belanja..... 10
4.7 Kebijakan Akuntansi Kas 11
4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan 11
4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap 11
4.10. Kebijakam Akuntansi Kewajiban..... 12
BAB V RINCIAN POS POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 Penjelasan Pos pos Laporan Realisasi Anggaran..... 13
5.2 Penjelasan Pos pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih..... 16
5.3 Neraca..... 17
5.4 Laporan Operasional 21
5.5 Laporan Arus Kas..... 24
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas..... 28
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi 30
6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas 30
BAB VII PENUTUP..... 31
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Anggaran dan Realisasi Program/ Kegiatan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara
Tabel. 2 Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara Tahun 2025
Tabel. 3 Pendapatan LRA
Tabel. 4 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan
Tabel. 5 Pendapatan BLUD dari Hibah
Tabel. 6 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain
Tabel. 7 Pendapatan BLUD dari APBD
Tabel. 8 Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah
Tabel. 9 Belanja Pegawai BLUD
Tabel. 10 Belanja Barang dan Jasa BLUD
Tabel. 11 Belanja Modal BLUD
Tabel. 12 Kas di Bendahara BLUD
Tabel. 13 Kas di Bendahara BOS
Tabel. 14 Persediaan
Tabel. 15 Peralatan dan Mesin
Tabel. 16 Gedung dan Bangunan
Tabel. 17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Tabel. 18 Aset Tetap Lainnya
Tabel. 19 Aset Lainnya
Tabel. 20 Ekuitas
Tabel. 21 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO
Tabel. 22 Pendapatan BLUD dari Hibah LO
Tabel. 23 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO

Tabel. 24 Pendapatan BLUD dari APBD LO
Tabel. 25 Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah LO
Tabel. 26 Belanja Pegawai BLUD LO
Tabel. 27 Belanja Barang dan Jasa BLUD
Tabel. 28 Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi
Tabel. 29 Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi
Tabel. 29.1 Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi
Tabel. 30 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi
Tabel. 31 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi
Tabel. 31.1 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi
Tabel. 32 Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Priode 2025
Tabel. 33 Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025

DAFTAR LAMPIRAN

REKENING KORAN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kami berharap dengan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) di Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD SMK N 1 BINUT
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NURAISAH, S.PD
Penata Tk. I/IIId
NIP. 197911222005022004

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SMK N 1 Bintan Utara Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (iii) Neraca; (iv) Laporan Operasional (LO); (v) Laporan Arus Kas (LAK); (vi) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (vii) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 25 Mei 2026
Pimpinan BLUD SMK N 1 Bintan Utara
Provinsi Kepulauan Riau,

NURAISAH, S.PD
Penata Tk. I/IIId
NIP. 197911222005022004

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 1 BINTAN UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN**	**2.611.750.000,00**	**2.615.615.335,00**	**100,15**	**0,00**
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	3.000.000,00	4.797.000,00	159,90	0,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00	#NUM!	0,00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	29.600.000,00	31.625.000,00	106,84	0,00
6	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	#NUM!	0,00
7	Pendapatan APBN/APBD	2.579.150.000,00	2.579.150.000,00	100,00	0,00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	0,00	43.335,00	0,00	0,00
	Jumlah PENDAPATAN	**2.611.750.000,00**	**2.615.615.335,00**	**100,15**	**0,00**
9	**BELANJA**				
10	**BELANJA OPERASI**	**1.895.575.000,00**	**1.843.934.809,00**	**97,28**	**0,00**
11	Belanja Pegawai	0,00	0,00	#NUM!	0,00
12	Belanja Barang dan Jasa	1.895.575.000,00	1.843.934.809,00	97,28	0,00
13	Bunga	0,00	0,00	#NUM!	0,00
14	Belanja Lain-lain	0,00	0,00	#NUM!	0,00
15	**BELANJA MODAL**	**716.175.000,00**	**716.175.000,00**	**100,00**	**0,00**
16	Belanja Tanah	0,00	0,00	#NUM!	0,00
17	Belanja Peralatan dan Mesin	463.335.000,00	463.335.000,00	100,00	0,00
18	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	#NUM!	0,00
19	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	#NUM!	0,00
20	Belanja Aset Tetap Lainnya	252.840.000,00	252.840.000,00	100,00	0,00
21	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	#NUM!	0,00
	Jumlah BELANJA	**2.611.750.000,00**	**2.560.109.809,00**	**98,02**	**0,00**
	Surplus/ Defisit Sebelum Pembiayaan	**0,00**	**55.505.526,00**	**0,00**	**0,00**
22	**PENERIMAAN**				

23	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**0,00**	**0,00**	**#NUM!**	**0,00**
24	Penggunaan SILPA	0,00	0,00	#NUM!	0,00
25	Penerimaan dari Divestasi	0,00	0,00	#NUM!	0,00
26	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00	#NUM!	0,00
	Jumlah PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**0,00**	**0,00**	**#NUM!**	**0,00**
27	**PENGELUARAN**				
28	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**0,00**	**0,00**	**#NUM!**	**0,00**
29	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00	#NUM!	0,00
30	Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00	#NUM!	0,00
31	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00	#NUM!	0,00
	Jumlah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**0,00**	**0,00**	**#NUM!**	**0,00**
	Pembiayaan Neto	**0,00**	**0,00**	**#NUM!**	**0,00**

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
	Surplus/ Defisit	**0,00**	**55.505.526,00**	**0,00**	**0,00**

Kepulauan Riau, 25 Mei 2026

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

Nurabiah, S.Pd
19791122200803022004

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 1 BINTAN UTARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	**7.5.2.1**	0,00	0,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**7.5.2.2**	0,00	0,00
3	Subtotal (1-2)		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	**7.5.2.3**	55.505.526,00	0,00
5	Subtotal (3+4)		55.505.526,00	0,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	**7.5.2.6**	55.505.526,00	0,00

Kepulauan Riau, 25 Mei 2026
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

Nuraisah, S.Pd
19791122 200502 2004

C. NERACA

PEMERINTAH KOTA KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 1 BINTAN UTARA
NERACA (BLUD)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	**ASET**	**1.1.**	**14.023.790.471,00**	**0,00**
2	**ASET LANCAR**	**1.1.1.**	**55.505.526,00**	**0,00**
3	Kas di Bendahara Penerimaan	1.1.1.00.	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.1.1.01.	0,00	0,00
5	Kas di BLUD	1.1.1.02.	55.505.526,00	0,00
6	Kas Dana BOS	1.1.1.03.	0,00	0,00
7	Kas Dana P2SP	1.1.1.04.	0,00	0,00
8	Kas Lainnya Setara Kas	1.1.1.05.	0,00	0,00
9	Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum	1.1.1.06.	0,00	0,00
10	Piutang Pajak	1.1.1.07.	0,00	0,00
11	Piutang Retribusi	1.1.1.08.	0,00	0,00
12	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.08.	0,00	0,00
13	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.09.	0,00	0,00
14	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.1.10.	0,00	0,00
15	Belanja dibayar dimuka	1.1.1.11.	0,00	0,00
16	Piutang Lainnya	1.1.1.12.	0,00	0,00
17	Persediaan Badan Layanan Umum	1.1.1.13.	0,00	0,00
	Jumlah ASET LANCAR		55.505.526,00	0,00
18	**ASET TETAP**	**1.1.2.**	**13.956.294.945,00**	**0,00**
19	Tanah	1.1.2.01.	1.215.400.000,00	0,00
20	Peralatan dan Mesin	1.1.2.02.	7.246.105.023,00	0,00
21	Gedung dan Bangunan	1.1.2.03.	3.910.235.719,00	0,00
22	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.1.2.04.	116.344.600,00	0,00
23	Aset Tetap Lainnya	1.1.2.05.	1.468.209.603,00	0,00
24	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.1.2.06.	0,00	0,00
25	Akumulasi Penyusutan	1.1.2.07.	0,00	0,00
	Jumlah ASET TETAP		13.956.294.945,00	0,00



26	**PIUTANG JANGKA PANJANG**	**1.1.3.**	**0,00**	**0,00**
27	Tagihan Penjualan Angsuran	1.1.3.01.	0,00	0,00
28	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	1.1.3.02.	0,00	0,00
29	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.3.03.	0,00	0,00
	Jumlah PIUTANG JANGKA PANJANG		0,00	0,00
30	**ASET LAINNYA**	**1.1.4.**	**11.990.000,00**	**0,00**
31	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.1.4.01.	0,00	0,00
32	Dana Kelolaan	1.1.4.02.	0,00	0,00
33	Aset yang dibatasi Penggunaannya	1.1.4.03.	0,00	0,00
34	Aset Tak Berwujud	1.1.4.04.	0,00	0,00

Halaman 1

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
35	Aset Lain - Lain	1.1.4.05.	11.990.000,00	0,00
36	Akumulasi Amortisasi	1.1.4.06.	0,00	0,00
	Jumlah ASET LAINNYA		11.990.000,00	0,00
	JUMLAH ASET		14.023.790.471,00	0,00
37	**KEWAJIBAN**	**1.2.**	**0,00**	**0,00**
38	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**1.2.1.**	**0,00**	**0,00**
39	Utang Usaha	1.2.1.01.	0,00	0,00
40	Utang Pihak Ketiga	1.2.1.02.	0,00	0,00
41	Utang Pajak	1.2.1.03.	0,00	0,00
42	Utang Kepada KUN	1.2.1.04.	0,00	0,00
43	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.2.1.05.	0,00	0,00
44	Belanja yang masih harus dibayar	1.2.1.06.	0,00	0,00
45	Pendapatan Diterima Dimuka	1.2.1.07.	0,00	0,00
46	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.2.1.08.	0,00	0,00
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0,00	0,00
47	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**1.2.2.**	**0,00**	**0,00**
48	Utang Jangka Panjang	1.2.2.01.	0,00	0,00
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		0,00	0,00
49	**EKUITAS**	**1.3.**	**14.023.790.471,00**	**0,00**
50	**EKUITAS**	**1.3.1.**	**14.023.790.471,00**	**0,00**
51	Ekuitas	1.3.1.01.	14.023.790.471,00	0,00
	Jumlah EKUITAS		14.023.790.471,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS		14.023.790.471,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		14.023.790.471,00	0,00

Kepulauan Riau, 25 Mei 2026

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Nuraisah, S.Pd

19791122006022004

D. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KOTA KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 1 BINTAN UTARA
LAPORAN OPERASIONAL (BLUD)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	**PENDAPATAN**				
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	4.797.000,00	0,00	4.797.000,00	100,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00	0,00	#NUM!
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama	31.625.000,00	0,00	31.625.000,00	100,00
5	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	#NUM!
6	Pendapatan Usaha Lainnya	43.335,00	0,00	43.335,00	100,00
7	Pendapatan APBN/ APBD	2.579.150.000,00	0,00	2.579.150.000,00	100,00
	Jumlah PENDAPATAN	**2.615.615.335,00**	**0,00**	2.615.615.335,00	100,00
8	**BEBAN**				
9	Beban Pegawai	0,00	0,00	0,00	#NUM!
10	Beban Persediaan	1.059.969.408,00	0,00	1.059.969.408,00	100,00
11	Beban Jasa	156.637.800,00	0,00	156.637.800,00	100,00
12	Beban Pemeliharaan	140.152.500,00	0,00	140.152.500,00	100,00
13	Beban Langganan Daya dan Jasa	300.900.092,00	0,00	300.900.092,00	100,00
14	Beban Perjalanan Dinas	186.275.009,00	0,00	186.275.009,00	100,00
15	Beban Penyusutan Aset	0,00	0,00	0,00	#NUM!
16	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	#NUM!
	Jumlah BEBAN	**1.843.934.809,00**	**0,00**	1.843.934.809,00	100,00
	Surplus/Defisit Operasional	**771.680.526,00**	**0,00**	771.680.526,00	100,00
17	**KEGIATAN NON OPERASIONAL**				
18	Surplus/ Defisit Penjualan Aset Nonlancar	0,00	0,00	0,00	#NUM!
19	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	0,00	0,00	0,00	#NUM!

20	Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	#NUM!
	Jumlah Surplus/Defisit Dari KEGIATAN NON OPERASIONAL	**0,00**	**0,00**	0,00	#NUM!
	Surplus/Defisit Sebelum POS LUAR BIASA	**771.680.526,00**	**0,00**	771.680.526,00	100,00
21	**POS LUAR BIASA**				
22	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	#NUM!
23	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	#NUM!
	Jumlah POS LUAR BIASA	**0,00**	**0,00**	0,00	#NUM!
	Surplus/Defisit-LO	**771.680.526,00**	**0,00**	771.680.526,00	100,00

Kepulauan Riau, 25 Mei 2026

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Nuraisah, S.Pd

19791122 2005022004

E. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 1 BINTAN UTARA
LAPORAN ARUS KAS (BLUD)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	**Arus Masuk Kas**		
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	4.797.000,00	0,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	31.625.000,00	0,00
6	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
7	Pendapatan APBN/APBD	2.579.150.000,00	0,00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	43.335,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	2.615.615.335,00	0,00
9	**Arus Keluar Kas**		
10	Pembayaran Pegawai	0,00	0,00
11	Pembayaran Barang dan Jasa	1.193.901.893,00	0,00
12	Pembayaran Pemeliharaan	162.857.815,00	0,00
13	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	300.900.092,00	0,00
14	Pembayaran Perjalanan Dinas	186.275.009,00	0,00
15	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	1.843.934.809,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi	771.680.526,00	0,00
16	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
17	**Arus Masuk Kas**		
18	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
19	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
20	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
21	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
22	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
23	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
24	Penerimaan dari Divestasi	0,00	0,00

25	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
26	**Arus Keluar Kas**		
27	Perolehan Tanah	0,00	0,00
28	Perolehan Peralatan dan Mesin	463.335.000,00	0,00
NO	**URAIAN**	**2025**	**2024**
1	2	3	4
29	Perolehan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
30	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
31	Perolehan Aset Tetap Lainnya	252.840.000,00	0,00
32	Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
33	Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00
34	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	716.175.000,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(716.175.000,00)	0,00
35	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**		
36	**Arus Masuk Kas**		
37	Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00
38	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
39	**Arus Keluar Kas**		
40	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00
41	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00
42	Penyetoran ke Kas Negara	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
43	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**		
44	**Arus Masuk Kas**		
45	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
46	**Arus Keluar Kas**		
47	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
48	**Kenaikan/ Penurunan Kas BLU**	55.505.526,00	0,00
49	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLU**	0,00	0,00
50	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU**	55.505.526,00	0,00

Kepulauan Riau, 25 Mei 2026

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Nuraisah, S.Pd

197911222005022004

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 1 BINTAN UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (BLUD)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Ekuitas Awal		0,00	0,00
2	Surplus/Defisit-LO		771.680.526,00	0,00
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		13.252.109.945,00	0,00
4	Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
6	Lain-lain		0,00	0,00
7	Ekuitas Akhir		**14.023.790.471,00**	**0,00**

Kepulauan Riau, 25 Mei 2026
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

Nurnisah, S.Pd
197911222005022004

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan Keuangan BLUD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran ;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan BLUD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala BLUD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan BLUD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SMK Negeri 1 Bintan Utara Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan RiauTahun 2025.
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
19. Peraturan Gubernur No. 1407 Tahun 2024 tentang SMKN sebagai BLUD daerah KEPRI

1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara Tahun 2025, adalah tanggungjawab sepenuhnya BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara, dalam hal ini adalah Pimpinan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara

1.4 Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (*Subsequent Event*) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara tahun 2026. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2026.

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara
- 1.4 Periode Pelaporan Keuangan
- 1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Profil BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara
- 2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara
- 2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara tahun 2025

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Asumsi dasar Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- 4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja
- 4.7 Kebijakan Akuntansi Kas
- 4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan
- 4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- 4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Neraca
- 5.4 Laporan Operasional
- 5.5 Laporan Arus Kas
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.7 Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan atas informasi – Informasi non Keuangan
- 6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
- 6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

Bab VII Penutup

BAB II

PROFIL BLUD SMK NEGERI 1 BINTAN UTARA

2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara

BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten serta tenaga ahli yang mendukung pelaksanaan *Teaching Factory (TEFA).* SDM yang tersedia meliputi:

1. Tenaga Pendidik (Guru Produktif dan Normatif):
   - Guru bersertifikasi keahlian industri sesuai bidang kompetensi.
   - Guru mata pelajaran umum yang mendukung kurikulum berbasis kompetensi.
   - Instruktur dari dunia industri yang terlibat dalam program pelatihan siswa.
2. Tenaga Kependidikan:
   - Staf administrasi yang mengelola keuangan dan operasional BLUD.
   - Teknisi laboratorium dan bengkel untuk mendukung kegiatan praktik.
   - Tenaga keamanan dan kebersihan untuk menjaga lingkungan sekolah yang kondusif.
3. Kemitraan dengan Industri:
   - Mengundang praktisi industri sebagai instruktur tamu.
   - Menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk program magang dan penyerapan tenaga kerja.
   - Mengembangkan skema sertifikasi kompetensi yang diakui dunia usaha dan industri.

Sebagai SMK BLUD yang berbasis *Teaching Factory* (TEFA) dan Unit Produksi (UP), sekolah telah memiliki berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran berbasis produksi dan layanan industri, di antaranya:

1. Ruang Kelas dan Laboratorium:
   - Ruang kelas berbasis IT untuk pembelajaran teori.
   - Laboratorium komputer untuk simulasi bisnis digital dan desain grafis.
   - Perpustakaan digital sebagai pusat referensi dan literasi siswa.
2. Workshop dan Bengkel TEFA / UP:
   - Bengkel otomotif dengan peralatan servis kendaraan standar industri.
   - Dapur produksi kuliner yang dilengkapi dengan peralatan skala industri.
   - Studio desain dan multimedia untuk produksi konten digital dan video.
   - Workshop teknik bangunan untuk pelatihan konstruksi dan produksi material.
3. Fasilitas Pendukung:
   - Asrama atau tempat tinggal bagi siswa yang berasal dari luar daerah.
   - Ruang pemasaran produk hasil Teaching Factory.
   - Area publik seperti kantin dan koperasi sekolah yang dikelola oleh siswa.

Sebagai BLUD, SMK memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan Teaching Factory. Sumber dana sekolah berasal dari:

1. Dana BOS dan APBD:
   - Digunakan untuk operasional sekolah, gaji guru, serta pengadaan bahan ajar dan alat praktik.
2. Pendapatan dari Unit Usaha TEFA:
   - Hasil penjualan produk dari unit Teaching Factory.
   - Jasa layanan seperti servis otomotif, desain grafis, atau catering.
   - Kerjasama dengan industri dalam proyek tertentu.
3. Bantuan dari Pemerintah dan Swasta:
   - Hibah atau bantuan dari pemerintah untuk pengembangan kurikulum dan fasilitas.
   - Sponsor dari perusahaan yang mendukung pengembangan Teaching Factory.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara

Data bisa diperoleh dari RENSTRA Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bintan Utara tahun 2025-2029.

2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara

Tabe. 1 Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara

No	Unit Teaching Factory (TEFA)	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Keterangan
1	**TEFA TKRO**	Spooring Balancing	1.500.000,00	2.122.000,00	141%	
2	**TEFA TKJ**	Jasa pemasangan Mini ISP	1.000.000,00	1.550.000,00	124%	
3	**TEFA PH**	Loundry	500.000,00	925.000,00	185%	
4	**TEFA TKP**	Perbaikan		200.000,00	100%	

BAB III

INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja pada BLUD SMK, pada laporan keuangan ini digunakan sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat managemen yang digunakan untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran dan tujuan, untuk mewujudkan misi dan visi organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut akan disajikan data kinerja BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2 Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
A. Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa					
1	Persentase kelulusan siswa	100%	100%	100%	2% siswa tidak lulus karena remedial yang belum tuntas
2	Rata-rata nilai Ujian Kompetensi Keahlian (UKK)	≥ 80	83	96%	Mencapai target
3	Persentase siswa yang memperoleh sertifikasi kompetensi industri	70%	60%	92%	Beberapa siswa belum lulus uji sertifikasi
4	Persentase lulusan yang bekerja sesuai kompetensi dalam 6 bulan	60%	61%	98%	Hampir mencapai target, perlu peningkatan kemitraan
5	Persentase lulusan yang berwirausaha	8%	10%	80%	Melebihi target, program wirausaha berjalan baik
B. Kinerja Keuangan dan Unit Usaha BLUD					
6	Persentase pendapatan unit usaha BLUD terhadap biaya operasional sekolah	30%	28%	93%	Hampir mencapai target, strategi pemasaran perlu ditingkatkan
7	Efisiensi penggunaan dana BLUD sesuai rencana kerja	85%	90%	94%	Anggaran terserap dengan baik dan efektif
C. Kinerja Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)					
8	Jumlah kerja sama aktif dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	6mitra	10 mitra	120%	Melebihi target, kerja sama dengan lebih banyak perusahaan
9	Persentase siswa yang menjalani magang industri	100%	100%	100%	Semua siswa telah menjalani magang
10	Jumlah produk atau jasa unggulan dari Teaching Factory (TEFA)	8 produk	3 produk	26%	Ada satu produk yang belum mencapai standar pasar
D. Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan					
11	Kepuasan siswa dan orang tua terhadap layanan pendidikan	80%	83%	96%	Melebihi target berdasarkan survei internal
12	Jumlah guru produktif bersertifikasi industri	75%	70%	93%	Hampir mencapai target, ada guru dalam proses sertifikasi

Berdasarkan tabel pencapaian, secara keseluruhan SMK BLUD telah mencapai rata-rata 90% dari target yang ditetapkan. Beberapa indikator bahkan melebihi target, seperti wirausaha lulusan, jumlah mitra industri, dan kepuasan siswa. Namun, ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, seperti pencapaian sertifikasi kompetensi siswa dan pengembangan produk Teaching Factory. Untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memperkuat kemitraan dengan industri untuk meningkatkan jumlah lulusan yang bekerja sesuai kompetensi.
2. Optimalisasi pemasaran unit usaha BLUD untuk meningkatkan pendapatan sekolah.
3. Meningkatkan kesiapan siswa dalam uji sertifikasi industri melalui bimbingan tambahan.
4. Pengembangan produk Teaching Factory agar lebih kompetitif di pasar.

Dengan perbaikan strategi ini, diharapkan SMK BLUD dapat mencapai 100% target di tahun mendatang.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Adapun hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target realisasi antara lain :

b. Hambatan dalam Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa

1. Kurangnya kesiapan siswa dalam ujian sertifikasi industri
   - Tidak semua siswa memiliki kesiapan yang cukup untuk lulus uji sertifikasi.
   - Kurangnya akses terhadap bahan ajar atau simulasi ujian sesuai standar industri.
   - Biaya sertifikasi yang masih menjadi kendala bagi sebagian siswa.
2. Tingkat kelulusan yang belum 100%
   - Beberapa siswa mengalami kesulitan dalam mata pelajaran teori maupun praktik.
   - Kurangnya motivasi belajar dan tingkat kehadiran siswa yang rendah.
3. Penyerapan lulusan ke dunia kerja belum optimal
   - Persaingan ketat di dunia kerja sehingga tidak semua lulusan langsung terserap.
   - Kurangnya pengalaman praktis yang relevan dengan kebutuhan industri.
   - Masih ada lulusan yang lebih memilih bekerja di luar bidang keahlian mereka.

b. Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan dan Unit Usaha BLUD

1. Pendapatan unit usaha BLUD belum mencapai target
   - Persaingan dengan produk atau jasa dari industri komersial yang lebih mapan.
   - Kurangnya strategi pemasaran dan branding produk/jasa SMK BLUD.
   - Keterbatasan modal untuk meningkatkan skala produksi dan inovasi produk.

2. Efisiensi penggunaan dana BLUD
   - Masih ada beberapa program yang belum berjalan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas.
   - Keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah atau sumber pendanaan lain.

c. Hambatan dalam Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)
   1. Jumlah produk unggulan Teaching Factory belum optimal
      - Keterbatasan bahan baku atau alat produksi yang menyebabkan terhambatnya pengembangan produk baru.
      - Produk belum sepenuhnya sesuai standar pasar, sehingga masih butuh perbaikan dalam kualitas dan pemasaran.
   2. Kemitraan industri masih perlu diperluas
      - Tidak semua industri bersedia menerima siswa magang karena keterbatasan kapasitas mereka.
      - Kurangnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja.

d. Hambatan dalam Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan
   1. Tingkat kepuasan siswa dan orang tua belum maksimal
      - Beberapa siswa merasa materi pembelajaran masih kurang relevan dengan dunia kerja.
      - Orang tua belum sepenuhnya memahami konsep BLUD di SMK, sehingga kurang mendukung program sekolah.
   2. Kurangnya jumlah guru bersertifikasi industri
      - Tidak semua guru memiliki kesempatan mengikuti pelatihan atau sertifikasi karena keterbatasan waktu dan biaya.
      - Masih ada kendala administratif dalam proses pengajuan sertifikasi guru ke lembaga industri terkait.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Akuntansi adalah BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara Provinsi Kepulauan Riau.

4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas;
b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara Provinsi Kepulauan Riau adalah:

a) ***Basis Kas*** untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam ***Laporan Realisasi Anggaran***
Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat Kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

b) ***Basis akrual*** untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam ***Neraca***
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

c) ***Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran*** berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riautidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

d) ***Basis akrual untuk neraca*** berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas;

4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengakuan dan pengukuran atas transaksi kejadian ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan ini adalah:

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.
   Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD , adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara tahun 2025, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat Diterima pada Rekening Kas Umum. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum untuk seluruh transaksi setelah dilakukan pengesahan definitif bendahara. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

4.7 Kebijakan Akuntansi Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas secara umum diakui jika memenuhi kriteria:

a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.

4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari:

- Barang Konsumsi;
- Bahan untuk pemeliharaan;
- Suku cadang;
- Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
- Bahan baku;
- Barang dalam proses/setengah jadi;

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal; diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.

4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

e. dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.

4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

BAB V

RINCIAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang telah disusun BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini:

5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan – LRA

Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp 2.615.615.335,00 atau sebesar 100,15% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 2.611.750.000,00 sebagaimana ikhtisar sebagai berikut:

Tabel.3. Pendapatan-LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	3.000.000,00	4.797.000,00	159,90 %	
Pendapatan BLUD dari Hibah				
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	29.600.000,00	31.625.000,00	106,84%	
Pendapatan BLUD dari APBD	2.579.150.000,00	2.579.150.000,00	100,00%	
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	0,00	43.335,00,00	0,00	
TOTAL PENDAPATAN BLUD	2.611.750.000,00	2.615.615.335,00	100,15%	

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Tahun 2025 sebesar Rp 4.797.000,00 atau 159,90% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 3.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.4. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Pendapatan TEFA TKJ	1.000.000,00	1.550.000,00	55%	**0,00**
Pendapatan TEFA TKRO	1.500.000,00	2.122.000,00	41,47%	0,00
Pendapatan TEFA PH	500.000,00	925.000,00	85%	0,00
Pendapatan TEFA TKP	-	200.000,00	100%	0,00

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	3.000.000,00	4.797.000,00	159,90%	0,00

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah Tahun 2025 sebesar Rp -,00 atau -,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp -,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.5. Pendapatan BLUD dari Hibah

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Hibah SPP				
Hibah Kementerian				
Dst.....				
Total Pendapatan BLUD dari Hibah				

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Tahun 2025 sebesar Rp 31.625.000,00 atau 93,60%% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 29.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.6. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Kantin 1 Nurul	3.075.000,00	3.200.000,00	104,07%	
Kantin 2 Akbar	3.075.000,00	3.200.000,00	104,07%	
Kantin 3 Delima	3.075.000,00	3.200.000,00	104,07%	
Kantin 4 Desma	3.075.000,00	3.200.000,00	104,07%	
Kantin 5 Teti	3.075.000,00	3.200.000,00	104,07%	
Kantin 6 Linda	3.075.000,00	3.200.000,00	104,07%	
Kantin 7 Zainal	3.075.000,00	3.100.000,00	100,81%	
Kantin 8 Arma	3.075.000,00	3.100.000,00	100,81%	-
Koperasi Maju Bersama	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%	
Sewa mobil	500.000,00	1.050.000,00	210,00%	
Sewa Tenda	500.000,00	700.000,00	140,00%	
Sewa kursi	500.000,00	975.000,00	195,00%	
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	29.600.000,00	31.625.000,00	106,84%	

iv) Pendapatan BLUD dari APBD/APBN

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD/APBN Tahun 2025 sebesar Rp 2.579.150.00,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 2.579.150.00,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.7. Pendapatan BLUD dari APBD

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Dana BOSP	2.579.150.000,00	2.579.150.000,00	**100,00%**	**0,00**
Total Pendapatan BLUD dari APBD	2.579.150.000,00	2.579.150.000,00	**100,00%**	**0,00**

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.8. Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pedapatan BLUD yang Sah

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Lain-lain Pendapatan Blud yang Sah (Jasa Giro)	0,00	43.335,00	0,00	0,00
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	0,00	43.335,00	0,00	0,00

b. Belanja

1. Belanja Pegawai BLUD

Berupa Belanja Gaji & Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan BLUD dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % dari total anggaran belanja pegawai BLUD yang sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.9. Belanja Pegawai BLUD

Uraian	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	
Belanja Tambahan Penghasilan	0,00	0,00	
Total Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp 2.611.750.000,00 atau 98,02% dari total anggaran belanja barang dan jasa yang sebesar Rp 2.560.109.809,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.10. Belanja Barang dan Jasa BLUD

	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Barang	1.012.174.584,00	984.811.093,00	24,05%
Belanja Jasa	531.690.892,00	509.990.892,00	100,00%
Belanja Pemeliharaan	162.857.815,00	162.857.815,00	100,00%
Belanja Perjalanan Dinas	188.851.709,00	186.275.009,00	98,63%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	463.335.000,00	463.335.000,00	100,00%
Belanja Moda Aset Tetap Lainnya	252.840.000,00	252.840.000,00	100,00%
Total Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.611.750.000,00	2.560.109.809,00	98,02%

3. Belanja Modal BLUD

Belanja modal BLUD terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp 716.175.000,00 atau 100,00% dari total anggaran belanja modal peralatan dan mesin yang sebesar Rp 716.175.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.11. Belanja Modal BLUD

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	463.335.000,00	463.335.000,00	100,00%	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	252.840.000,00	252.840.000,00	100,00%	0,00
Total Belanja Modal BLUD	716.175.000,00	716.175.000,00	100,00%	0,00

5.2 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo awal SAL pada tahun 2025 sebesar Rp 0,00 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

2) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan digunakan dalam rangka membiayai defisit tahun anggaran berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 0,00 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

3) Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SiLPA tahun 2025 sebesar Rp 55.505.526,00

5.3 Neraca

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- Berupa kas/setara kas dan persediaan

Aset Lancar sebesar Rp 55.505.526,00 yang dimiliki BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara per 31 Desember 2025 terdiri dari:

a. Kas di Bendahara BLUD

Kas BLUD adalah semua bentuk penerimaan dan pengeluaran uang tunai atau setara kas yang dikelola oleh SMK Negeri 1 Bintan Utara dalam rangka menjalankan operasionalnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, dan pendapatan lainnya. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp 17.242.035,00 dengan rincian :

Tabel.12. Kas di Bendahara BLUD

Uraian	Jumlah
Kas di Bank	
Rek Bank No. Rek 146.01.0001 BRK Syariah	16.668.135,00
Kas Tunai di Bendahara Penerimaan	430.000,00
Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran	4.706.700,00
Bantuan PKL Siswa (Bukan dana BLUD)	(4.132.800,00)
Total Kas di Bendahara BLUD	17.242.035,00

b. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan kas dibawah pengelolaan bendahara BOS yang bersumber dari pemerintah utuk mendukung operasional sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan tanpa membebani peserta didik. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BOS sebesar RP 38.263.491,00 dengan rincian :

Tabel.13. Kas di Bendahara BOS

Uraian	Jumlah
Kas di Bank	
Rek Bank No. Rek 146.38.0005 BRK Syariah	0
Kas Tunai	38.263.491,00
Total Kas di Bendahara BOS	38.263.491,00

c. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 terdiri dari :

Tabel.14. Persediaan

Uraian	Jumlah
Persediaan Barang Habis Pakai	
- Bahan	Rp 0,00
- Suku Cadang	Rp 0,00
Dst.....	Rp 0,00
Persediaan BarangTidak Habis Pakai	Rp 0,00
Dst....	Rp 0,00
Total Persediaan	Rp 0,00

2. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh pelayanan umum. Aset tetap sebesar Rp 13.956.294.945,00 per 31 Desember 2025 merupakan nilai perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan yang pengadaannya bersumber dari pengelolaan dana BOS dan dana SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dan BLUD.

a. Tanah

Nilai aset tanah BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.215.400.000,00 dan tidak terdapat penambahan aset tetap tanah selama tahun 2025.

b. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara per 31 Desember 2025 sebesar Rp 7.246.105.023,00 meningkat sebesar Rp 0,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp 0,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel.15. Peralatan dan Mesin

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**Rp 7.246.105.023,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap xxxxx	Rp 0,00
- Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kementerian xxx.....Dst	Rp 0,00
Total Penambahan	Rp 0,00
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel...Dst	Rp 0,00

Total Pengurangan :	Rp 0,00
Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**Rp 7.246.105.023,00**

c. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara per 31 Desember 2025 sebesar Rp 3.910.235.719,00 meningkat sebesar Rp 0,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp 0,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel.16. Gedung dan Bangunan

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**Rp 3.910.235.719,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**Rp 0,00**
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap xxxxx	Rp 0,00
- Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kementerian xxx.....Dst	Rp 0,00
Total Penambahan	**Rp 0,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel...Dst	Rp 0,00
Total Pengurangan :	
Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**Rp 3.910.235.719,00**

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara per 31 Desember 2025 sebesar Rp 116.344.600,00 meningkat sebesar Rp 0,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp 0,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel.17. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**Rp 116.344.600,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 0,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap xxxxx	Rp 0,00
- Hibah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kementerian xxx.....Dst	Rp 0,00
Total Penambahan	**Rp 0,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel...Dst	Rp 0,00
Total Pengurangan :	**Rp 0,00**

Uraian	Jumlah
Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**Rp 166.344.600,00**

e. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Aset Tetap Lainnya BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.468.209.603,00 meningkat sebesar Rp 0,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp 0,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel.18. Aset Tetap Lainnya

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	**Rp 1.468.209.603,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 0,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap xxxxx	Rp 0,00
- Hibah Aset Tetap Lainnya dari Kementerian xxx.....Dst	Rp 0,00
Total Penambahan	**Rp 0,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Lainnya	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel...Dst	Rp 0,00
Total Pengurangan :	**Rp 0,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya	**Rp 1.468.209.603,00**

3. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya dapat berupa Aset Tidak Berwujud dan Aset Rusak Berat/Tidak Digunakan Lagi dalam Operasional Kegiatan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara. mencatat Aset Lainnya sebesar Rp 11.990.000,00 terdiri dari Aset Tidak Berwujud (Software, dll) sebesar Rp 0,00 dan Aset Rusak Berat/Tidak Digunakan Lagi dalam Operasional Kegiatan sebesar Rp 0,00. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel.19. Aset Lainnya

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Lainnya	**Rp 11.990.000,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Lainnya	Rp 0,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap xxxxx	Rp 0,00
- Hibah Aset Lainnya dari Kementerian xxx.....Dst	Rp 0,00
Total Penambahan	**Rp 0,00**
Pengurangan :	

Uraian	Jumlah
Penghapusan Aset Lainnya	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel...Dst	
Total Pengurangan :	**Rp 0,00**
Saldo Akhir Aset Lainnya	**Rp 11.990.000,00**

4. Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara tidak memiliki kewajiban. (sesuaikan angka pada laporan neraca)

5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pada Tahun 2025 Ekuitas adalah sebesar Rp 14.023.790.471,00.

Tabel.20. Ekuitas

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Ekuitas	**Rp 0,00**
- Surplus/Defisit LO	Rp 771.680.526,00
- Koreksi Ekuitas	Rp 3.252.109.945,00
Saldo Ekuitas Akhir	Rp 14.023.790.471,00

5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional
b) Beban dari kegiatan operasional
c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
d) Pos luar biasa
e) Surplus/defisit LO

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional

Pendapatan LO dari kegiatan operasional terdiri dari :

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2025 sebesar Rp 4.797.000,00 lebih tinggi/rendah dari Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.21. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan TEFA TKRO	2.122.000,00	**0**	100,00%	2.122.000,00
Pendapatan TEFA TKJ	1.550.000,00	**0**	100,00%	1.550.000,00
Pendapatan TEFA PH	925.000,00	0	100,00%	925.000,00
Pendapatan TEFA TKP	200.000,00	0	100,00%	200.000,00
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO	4.797.000,00	0	100,00%	4.797.000,00

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 lebih tinggi/rendah dari pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2024 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.22 Pendapatan BLUD dari Hibah LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Hibah SPP	0,00	0,00		0,00
Hibah Kementerian	0,00	0,00		0,00
Total Pendapatan BLUD dari Hibah LO	0,00	0,00		0,00

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO Tahun 2025 sebesar Rp 31.625.000,00 lebih tinggi/rendah dari pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO Tahun 2024 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.23 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Kantin 1 Nurul	3.200.000,00		96,09%	3.200.000,00
Kantin 2 Akbar	3.200.000,00		96,09%	3.200.000,00
Kantin 3 Delima	3.200.000,00		96,09%	3.200.000,00
Kantin 4 Desma	3.200.000,00		96,09%	3.200.000,00
Kantin 5 Teti	3.200.000,00		96,09%	3.200.000,00
Kantin 6 Linda	3.200.000,00		96,09%	3.200.000,00
Kantin 7 Zainal	3.100.000,00		96,09%	3.100.000,00
Kantin 8 Arma	3.100.000,00		96,09%	3.100.000,00
Koperasi Maju Bersama	3.500.000,00		100%	3.500.000,00
Sewa mobil	1.050.000,00		47,62%	1.050.000,00
Sewa Tenda	700.000,00		71,43%	700.000,00
Sewa kursi	975.000,00		51,28%	975.000,00

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	31.625.000,00		93,60%	31.625.000,00

iv) Pendapatan BLUD dari APBD/APBN LO

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD LO Tahun 2025 sebesar Rp 2.579.150.000,00 lebih tinggi/rendah dari pendapatan BLUD dari APBD LO sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.24 Pendapatan BLUD dari APBD LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Dana BOSP	2.579.150.000,00	0,00	100,00%	2.579.150.000,00
Total Pendapatan BLUD dari APBD LO	2.579.150.000,00	0,00	100,00%	2.579.150.000,00

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 lebih tinggi/rendah dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2024 sebesar Rp 43.335,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 25 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	43.335,00	0,00	100%	43.335,00
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO	43.335,00	0,00	100%	43.335,00

b) Beban dari kegiatan operasional

1. Belanja Pegawai BLUD LO

Berupa Beban Gaji & Tunjangan dan Beban Tambahan Penghasilan BLUD LO dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp 0,00 lebih tinggi/rendah dari beban pegawai BLUD LO tahun 2024 yang sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 26 Belanja Pengawai BLUD LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00		
Beban Tambahan Penghasilan	0,00	0,00		
Total Beban Pegawai BLUD	0,00	0,00		

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Beban barang dan jasa LO tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 1.843.934.809,00 lebih tinggi/rendah dari dari Beban barang dan jasa LO tahun 2024 yang sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 27 Belanja Barang dan Jasa BLUD

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan
Beban Persediaan	1.059.969.408,00	0,00	100,00%	1.059.969.408,00
Beban Jasa	156.637.800,00	0,00	100,00%	156.637.800,00
Beban Pemeliharaan	140.152.500,00	0,00	100,00%	140.152.500,00
Beban Langganan Daya dan Jasa	300.900.092,00			300.900.092,00
Belanja Perjalanan Dinas	186.275.009,00	0,00	100,00%	186.275.009,00
Total Beban Barang dan Jasa BLUD	1.843.934.809,00	0,00	100,00%	1.843.934.809,00

c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan dikelompokkan dalam kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara tahun 2025 sebesar Rp 0,00.

d) Surplus/defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan beban. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara mencatat surplus/Defisit LO sebesar Rp 771.680.526,00.

5.5 Laporan Arus Kas

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara. dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara pada Tahun 2025 sebesar Rp 2.615.615.335,00 yang terdiri dari:

Tabel. 28 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	4.797.000,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Hibah	0,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	31.625.000,00	0,00
Pendapatan BLUD dari APBD	2.579.150.000,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	43.335,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	**2.615.615.335,00**	**0,00**

b. Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara selama Tahun 2025 sebesar Rp 1,843.934.809,00 terdiri dari:

Tabel. 29 Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		**0,00**
Arus Masuk Kas		0,00
Belanja Pegawai	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	1.193.901.893,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	162.857.815,00	0,00
Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	300.900.09200	0,00
Pembayaran Perjalanan Dinas	186.275.009,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	**1.843.934.809,00**	**0,00**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp 771.680.526,00 Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

Tabel.29.1 Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	771.680.526,00	0,00

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset Non-Keuangan lainnya.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan di masa yang akan datang.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara pada Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 yang terdiri dari:

Tabel. 30 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan Aset Tetap Tanah	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	0,00	0,00

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara pada Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 yang terdiri dari:

Tabel. 31 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	463.335.000,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	252.840.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	**716.175.000,00**	**0,00**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp 55.505.526,00 Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

Tabel. 31.1 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	55.505.526,00	0,00

3) Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Periode 2025

Kenaikan/(penurunan) Kas Bersih Selama Periode Tahun 2025 merupakan akumulasi jumlah kenaikan/(penurunan) kas bersih dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris.

Selama Tahun Anggaran 2025 terjadi kenaikan / penurunan kas bersih sebesar Rp 55.505.526,00 yang terdiri dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp 771.680.526,00 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp (716.175.000,00). Perbandingan Kenaikan / (Penurunan) Kas Bersih tahun 2025 dan 2024 adalah:

Tabel.32 Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Periode 2025

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	55.505.526,00	0,00

4) Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025

Saldo akhir kas per 31 Desember 2025 merupakan perhitungan Saldo Awal per 1 Januari 2025 ditambah (dikurangi) dengan kenaikan/ (penurunan) kas bersih selama periode tahun 2025.

Saldo akhir kas di BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara per 31 Desember 2025 sebesar Rp 55.505.526,00 didapat dari perhitungan saldo awal Tahun 2024 sebesar Rp 0,00 ditambah kenaikan/penurunan kas bersih selama periode tahun 2025 sebesar Rp Rp 55.505.526,00

Total Saldo Kas BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara Per 31 Desember 2025 sebesar Rp 55.505.526,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.33 Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas di BLUD	17.242.035,00	0,00
Kas Dana BOS	38.263.491,00	0,00
Saldo Akhir Kas	**55.505.526,00**	**0,00**

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

a) Ekuitas awal
b) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti:
   1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
   2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas Akhir

a) Ekuitas Awal

Pada Tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara mencatat ekuitas awal sebesar Rp 0,00 yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada laporan Tahun 2025. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Jumlah Aset Tahun 2025 Rp 0,00
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025 Rp 0,00
- **Saldo Awal Ekuitas 2025** **Rp 0,00**

b) Surplus/Defisit LO

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dalam Laporan Operasional Tahun 2025 tercatat sebesar Rp 771.680.526,00.

c) Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar Rp 14.023.790.471,00 merupakan saldo kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Total Aset dan Total Kewajiban BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara Tahun 2025.

- Jumlah Aset Tahun 2025 Rp 0,00
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025 Rp 0,00
- **Saldo Awal Ekuitas 2025** **Rp 14.023.790.471,00**

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 1407 Tahun 2024

BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara beralamat di Tanjunguban

6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nirlaba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di , dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara

PENUTUP

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun sebagai bentuk tanggung jawab BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, penyusunan laporan keuangan BLUD juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Secara umum pencapaian kinerja atas sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik, namun begitu masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang masih harus terus dibenahi dan menjadi perhatian oleh BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara

Dengan memperhatikan strategisnya peran sekolah dan besarnya tantangan yang dihadapi untuk mendukung Visi Misi Pendidikan Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, SMK Negeri 1 Bintan Utara. Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja serta memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan industri. Melalui pendekatan berbasis kompetensi, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta pengelolaan keuangan yang transparan melalui sistem BLUD, sekolah ini berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan lulusan SMK dapat menjadi tenaga kerja yang unggul dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Akhir kata, BLUD SMK Negeri 1 Bintan Utara Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan dalam penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban kami dalam menyajikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

Tanjungpinang, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 1 BINTAN UTARA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NURAISAH, S.Pd
Penata Tk. 1 / IIId
NIP. 197911222005022004



LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SMK NEGERI 1 KARIMUN
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

KATA PENGANTAR v

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWAB vii

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....viii

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH x

C. NERACA xi

D. LAPORAN OPERASIONAL.....xiv

E. LAPORAN ARUS KAS..... xvi

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS xx

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 2

1.3 Penangungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Karimun 3

1.4 Priode Pelaporan Keuangan 3

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 3

BAB II POFIL BLUD SMK NEGERI 1 KARIMUN

2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 1 Karimun 5

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 1 Karimun 6

2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Neferi 1 Karimun 6

BAB III INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

DAFTAR ISI

Tahun Anggaran 2024 7

3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi 8

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi 10

4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan..... 10

4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 10

4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 10

4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan..... 11

4.6 Kebijakan Akuntasni Belanja..... 11

4.7 Kebijakan Akuntansi Kas..... 11

4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan 12

4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap 12

4.10 Kebijakam Akuntansi Kewajiban..... 13

BAB V RINCIAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran..... 14

5.2 Penjelasan Pos Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 17

5.3 Neraca 17

5.4 Laporan Operasional 22

5.5 Laporan Arus Kas 25

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas 28

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi 30

6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas..... 30

BAB VII PENUTUP 31

LAMPIRAN 32

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Anggaran dan Realisasi Program/ Kegiatan BLUD SMK Negeri 1 Karimun 6
Tabel. 2 Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target BLUD SMK Negeri1 Karimun Tahun 2025 7
Tabel. 3 Pendapatan LRA 14
Tabel. 4 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 14
Tabel. 5 Pendapatan BLUD dari Hibah 15
Tabel. 6 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain 15
Tabel. 7 Pendapatan BLUD dari APBD 16
Tabel. 8 Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah 16
Tabel. 9 Belanja Pegawai BLUD 16
Tabel. 10 Belanja Barang dan Jasa BLUD 16
Tabel. 11 Belanja Modal BLUD 17
Tabel. 12 Kas di Bendahara BLUD 18
Tabel. 13 Kas di Bendahara BOS 18
Tabel. 14 Persediaan 18
Tabel. 15 Peralatan dan Mesin 19
Tabel. 16 Gedung dan Bangunan 20
Tabel. 17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 20
Tabel. 18 Aset Tetap Lainnya 21
Tabel. 19 Aset Lainnya 21
Tabel. 20 Ekuitas 22
Tabel. 21 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO 22
Tabel. 22 Pendapatan BLUD dari Hibah LO 23
Tabel. 23 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO 23
Tabel. 24 Pendapatan BLUD dari APBD LO 23
Tabel. 25 Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah LO 24
Tabel. 26 Belanja Pegawai BLUD LO 24
Tabel. 27 Belanja Barang dan Jasa BLUD 24
Tabel. 28 Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi 25
Tabel. 29 Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi 26
Tabel. 29.1 Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi 26
Tabel. 30 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi 26
Tabel. 31 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi 27
Tabel. 31.1 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi 27

Tabel. 32 Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Priode 2025 28
Tabel. 32.1 Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Priode 2025 28

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. BLUD SMK Negeri 1 Karimun adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Karimun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kami berharap dengan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) di Provinsi Kepulauan Riau.

Karimun, 25 Mei 2026
PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 1 KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Ali Basril, S.Pd., M.Pd.T.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 197504152005021005

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan SMK Negeri 1 Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (iii) Neraca; (iv) Laporan Operasional (LO); (v) Laporan Arus Kas (LAK); (vi) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (vii) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Karimun, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 1 KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Ali Basril, S.Pd., M.Pd.T.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 197504152005021005

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMK NEGERI 1 KARIMUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.564.155.000,00**	**2.463.816.187,00**	**96,09**	**0,00**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**111.505.000,00**	**11.166.187,00**	**10,01**	**0,00**
4.1.04.	**Lain-lain PAD yang Sah**	**111.505.000,00**	**11.166.187,00**	**10,01**	**0,00**
4.1.04.16.	**Pendapatan BLUD**	**111.505.000,00**	**11.166.187,00**	**10,01**	**0,00**
4.1.04.16.03.	Pendapatan BLUD dari Hibah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.16.04.	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	11.505.000,00	11.155.000,00	96,96	0,00
4.1.04.16.06.	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	0,00	11.187,00	#DIV/0!	0,00
4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.452.650.000,00**	**2.452.650.000,00**	**100,00**	**0,00**
4.2.01.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**2.452.650.000,00**	**2.452.650.000,00**	**100,00**	**0,00**
4.2.01.01.	**Dana Perimbangan**	**2.452.650.000,00**	**2.452.650.000,00**	**100,00**	**0,00**
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	2.452.650.000,00	2.452.650.000,00	100,00	0,00
5.	**BELANJA DAERAH**	**2.564.155.000,00**	**2.452.650.000,00**	**95,65**	**0,00**
5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.703.429.100,00**	**1.591.924.100,00**	**93,45**	**0,00**
5.1.02.	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.703.429.100,00**	**1.591.924.100,00**	**93,45**	**0,00**
5.1.02.01.	**Belanja Barang**	**1.180.595.157,00**	**1.137.081.157,00**	**96,31**	**0,00**
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	851.378.325,00	807.864.325,00	94,89	0,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	329.216.832,00	329.216.832,00	100,00	0,00
5.1.02.02.	**Belanja Jasa**	**241.422.301,00**	**201.722.301,00**	**83,56**	**0,00**
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	228.351.301,00	188.651.301,00	82,61	0,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.071.000,00	13.071.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.	**Belanja Pemeliharaan**	**38.915.000,00**	**38.915.000,00**	**100,00**	**0,00**
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32.415.000,00	32.415.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.04.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**242.496.642,00**	**214.205.642,00**	**88,33**	**0,00**
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	242.496.642,00	214.205.642,00	88,33	0,00
5.2.	**BELANJA MODAL**	**860.725.900,00**	**860.725.900,00**	**100,00**	**0,00**
5.2.02.	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**445.905.000,00**	**445.905.000,00**	**100,00**	**0,00**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
5.2.02.01.	**Belanja Modal Alat Besar**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**100,00**	**0,00**
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**222.820.000,00**	**222.820.000,00**	**100,00**	**0,00**
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	9.400.000,00	9.400.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	213.420.000,00	213.420.000,00	100,00	0,00
5.2.02.08.	**Belanja Modal Alat Laboratorium**	**166.660.000,00**	**166.660.000,00**	**100,00**	**0,00**
5.2.02.08.03.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	166.660.000,00	166.660.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10.	**Belanja Modal Komputer**	**52.725.000,00**	**52.725.000,00**	**100,00**	**0,00**
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	52.725.000,00	52.725.000,00	100,00	0,00
5.2.05.	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	**414.820.900,00**	**414.820.900,00**	**100,00**	**0,00**
5.2.05.01.	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan**	**414.820.900,00**	**414.820.900,00**	**100,00**	**0,00**
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	414.820.900,00	414.820.900,00	100,00	0,00
	SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM PEMBIAYAAN	**0,00**	**11.166.187,00**	**0,44**	**0,00**

Karimun, 25 Mei 2026
PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 1 KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Ali Basril, S. Pd., M.Pd.T.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 197504152005021005

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMK NEGERI 1 KARIMUN

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2.1	0.00	0.00
	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.2.2	0.00	0.00
	Subtotal (1-2)		0.00	0.00
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	7.5.2.3	11,166,187.00	0.00
	Subtotal (3+4)		11,166,187.00	0.00
	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0.00	0.00
	Lain-lain		0.00	0.00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	7.5.2.6	11,166,187.00	0.00

Karimun, 25 Mei 2026
PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 1 KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Ali Basril, S. Pd., M.Pd.T.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 197504152005021005

C. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMK NEGERI 1 KARIMUN
NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
	ASET	**1.1.**	**17,705,112,690.49**	**0.00**
	ASET LANCAR	**1.1.1.**	**11,166,187.00**	**0.00**
	Kas di Bendahara Penerimaan	1.1.1.00.	0.00	0.00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.1.1.01.	0.00	0.00
	Kas di BLUD	1.1.1.02.	11,166,187.00	0.00
	Kas Dana BOS	1.1.1.03.	0.00	0.00
	Kas Dana P2SP	1.1.1.04.	0.00	0.00
	Kas Lainnya Setara Kas	1.1.1.05.	0.00	0.00
	Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum	1.1.1.06.	0.00	0.00
	Piutang Pajak	1.1.1.07.	0.00	0.00
	Piutang Retribusi	1.1.1.08.	0.00	0.00
	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.08.	0.00	0.00
	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.09.	0.00	0.00
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.1.10.	0.00	0.00
	Belanja dibayar dimuka	1.1.1.11.	0.00	0.00
	Piutang Lainnya	1.1.1.12.	0.00	0.00
	Persediaan Badan Layanan Umum	1.1.1.13.	0.00	0.00
	Aset Untuk Dikonsolidasikan	1.1.1.14.	0.00	0.00
	Jumlah ASET LANCAR		11,166,187.00	0.00
	ASET TETAP	**1.1.2.**	**17,693,946,503.49**	**0.00**
	Tanah	1.1.2.01.	4,842,504,000.00	0.00
	Peralatan dan Mesin	1.1.2.02.	4,137,906,561.06	0.00
	Gedung dan Bangunan	1.1.2.03.	7,121,548,595.00	0.00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.1.2.04.	14,893,000.00	0.00
	Aset Tetap Lainnya	1.1.2.05.	2,159,406,115.00	0.00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.1.2.06.	0.00	0.00
	Akumulasi Penyusutan	1.1.2.07.	(582,311,767.57)	0.00
	Jumlah ASET TETAP		17,693,946,503.49	0.00
	PIUTANG JANGKA PANJANG	**1.1.3.**	**0.00**	**0.00**
	Tagihan Penjualan Angsuran	1.1.3.01.	0.00	0.00
	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	1.1.3.02.	0.00	0.00
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.3.03.	0.00	0.00
	Jumlah PIUTANG JANGKA PANJANG		0.00	0.00
	ASET LAINNYA	**1.1.4.**	**0.00**	**0.00**
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.1.4.01.	0.00	0.00
	Dana Kelolaan	1.1.4.02.	0.00	0.00
	Aset yang dibatasi Penggunaannya	1.1.4.03.	0.00	0.00
	Aset Tak Berwujud	1.1.4.04.	0.00	0.00
	Aset Lain - Lain	1.1.4.05.	0.00	0.00
	Akumulasi Amortisasi	1.1.4.06.	0.00	0.00
	Jumlah ASET LAINNYA		0.00	0.00
	JUMLAH ASET		17,705,112,690.49	0.00
	KEWAJIBAN	1.2.	0.00	0.00
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.2.1.	0.00	0.00
	Utang Usaha	1.2.1.01.	0.00	0.00
	Utang Pihak Ketiga	1.2.1.02.	0.00	0.00
	Utang Pajak	1.2.1.03.	0.00	0.00
	Utang Kepada KUN	1.2.1.04.	0.00	0.00
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.2.1.05.	0.00	0.00
	Belanja yang masih harus dibayar	1.2.1.06.	0.00	0.00
	Pendapatan Diterima Dimuka	1.2.1.07.	0.00	0.00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.2.1.08.	0.00	0.00
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0.00	0.00
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	1.2.2.	0.00	0.00
	Utang Jangka Panjang	1.2.2.01.	0.00	0.00

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0.00	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN		0.00	0.00
	EKUITAS	1.3.	17,705,112,690.49	0.00
	EKUITAS	1.3.1.	17,705,112,690.49	0.00
	Ekuitas	1.3.1.01.	17,705,112,690.49	0.00
	Jumlah EKUITAS		17,705,112,690.49	0.00
	JUMLAH EKUITAS		17,705,112,690.49	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		17,705,112,690.49	0.00

Karimun, 25 Mei 2026
PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 1 KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Ali Basril, S. Pd., M.Pd.T.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 197504152005021005

D. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMK NEGERI 1 KARIMUN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	KEGIATAN OPERASIONAL				
	PENDAPATAN				
	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	0.00	0.00	0.00	
	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0.00	0.00	0.00	
	Pendapatan Hasil Kerja Sama	11,155,000.00	0.00	11,155,000.00	100.00
	Pendapatan Hibah	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100.00
	Pendapatan Usaha Lainnya	11,187.00	0.00	11,187.00	100.00
	Pendapatan APBN/ APBD	2,452,650,000.00	0.00	2,452,650,000.00	100.00
	Jumlah PENDAPATAN	**2,563,816,187.00**	**0.00**	2,563,816,187.00	100.00
	BEBAN				
	Beban Pegawai	0.00	0.00	0.00	
	Beban Persediaan	1,175,090,157.00	0.00	1,175,090,157.00	100.00
	Beban Jasa	75,181,000.00	0.00	75,181,000.00	100.00
	Beban Pemeliharaan	38,915,000.00	0.00	38,915,000.00	100.00
	Beban Langganan Daya dan Jasa	160,241,301.00	0.00	160,241,301.00	100.00
	Beban Perjalanan Dinas	242,496,642.00	0.00	242,496,642.00	100.00
	Beban Penyusutan Aset	582,311,767.57	0.00	582,311,767.57	100.00
	Beban Bunga	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah BEBAN	**2,274,235,867.57**	**0.00**	2,274,235,867.57	100.00
	Surplus/Defisit Operasional	**289,580,319.43**	**0.00**	289,580,319.43	100.00
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus/ Defisit Penjualan Aset Nonlancar	0.00	0.00	0.00	
	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	0.00	0.00	0.00	
	Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah Surplus/Defisit Dari KEGIATAN NON OPERASIONAL	**0.00**	**0.00**	0.00	
	Surplus/Defisit Sebelum POS LUAR BIASA	**289,580,319.43**	**0.00**	289,580,319.43	100.00
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	0.00	0.00	0.00	
	Beban Luar Biasa	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah POS LUAR BIASA	**0.00**	**0.00**	0.00	
	Surplus/Defisit-LO	**289,580,319.43**	**0.00**	289,580,319.43	100.00

Karimun, 25 Mei 2026
PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 1 KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Ali Basril, S. Pd., M.Pd.T.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 197504152005021005

E. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMK NEGERI 1 KARIMUN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
	Arus Masuk Kas		
	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	0.00	0.00
	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0.00	0.00
	Pendapatan Hasil Kerja Sama	11,155,000.00	0.00
	Pendapatan Hibah	100,000,000.00	0.00
	Pendapatan APBN/APBD	2,452,650,000.00	0.00
	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	11,187.00	0.00
	Jumlah Arus Masuk Kas	2,563,816,187.00	0.00
	Arus Keluar Kas		
	Pembayaran Pegawai	0.00	0.00
	Pembayaran Barang dan Jasa	1,250,271,157.00	0.00
	Pembayaran Pemeliharaan	38,915,000.00	0.00
	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	160,241,301.00	0.00
	Pembayaran Perjalanan Dinas	242,496,642.00	0.00
	Pembayaran Bunga	0.00	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas	1,691,924,100.00	0.00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi	871,892,087.00	0.00
	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
	Arus Masuk Kas		
	Penjualan atas Tanah	0.00	0.00
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0.00	0.00
	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0.00	0.00
	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00
	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00
	Penjualan Aset Lainnya	0.00	0.00
	Penerimaan dari Divestasi	0.00	0.00
	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0.00	0.00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0.00	0.00
	Arus Keluar Kas		
	Perolehan Tanah	0.00	0.00
	Perolehan Peralatan dan Mesin	445,905,000.00	0.00
	Perolehan Gedung dan Bangunan	0.00	0.00
	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00
	Perolehan Aset Tetap Lainnya	414,820,900.00	0.00
	Perolehan Aset Lainnya	0.00	0.00

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
	Pengeluaran Penyertaan Modal	0.00	0.00
	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0.00	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas	860,725,900.00	0.00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(860,725,900.00)	0.00
	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
	Arus Masuk Kas		
	Penerimaan Pinjaman	0.00	0.00
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0.00	0.00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0.00	0.00
	Arus Keluar Kas		
	Pembayaran Pokok Pinjaman	0.00	0.00
	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0.00	0.00
	Penyetoran ke Kas Negara	0.00	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0.00	0.00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0.00	0.00
	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
	Arus Masuk Kas		
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0.00	0.00
	Arus Keluar Kas		
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0.00	0.00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0.00	0.00
	Kenaikan/ Penurunan Kas BLU	11,166,187.00	0.00
	Saldo Awal Kas Setara Kas BLU	0.00	0.00
	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU	11,166,187.00	0.00

Karimun, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 1 KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Ali Basril, S. Pd., M.Pd.T.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 197504152005021005

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMK NEGERI 1 KARIMUN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
	Ekuitas Awal		0.00	0.00
	Surplus/Defisit-LO		289,580,319.43	0.00
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		17,415,532,371.06	0.00
	Koreksi Nilai Persediaan		0.00	0.00
	Selisih Revaluasi Aset Tetap		0.00	0.00
	Lain-lain		0.00	0.00
	Ekuitas Akhir		**17,705,112,690.49**	**0.00**

Karimun, 25 Mei 2026
PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 1 KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Ali Basril, S. Pd., M.Pd.T.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 197504152005021005

G. ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

1. Laporan Keuangan BLUD terdiri dari :
2. Laporan Realisasi Anggaran ;
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
4. Neraca;
5. Laporan Operasional;
6. Laporan Arus Kas
7. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
8. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan BLUD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala BLUD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan BLUD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

1.1 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SMK Negeri 1 Karimun Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan RiauTahun 2024.
17. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Karimun Tahun 2025, adalah tanggungjawab sepenuhnya BLUD SMK Negeri 1 Karimun, dalam hal ini adalah Pimpinan BLUD SMK Negeri 1 Karimun.

Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Karimun tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Karimun tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (Subsequent Event) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Karimun tahun 2026. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2026.

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Karimun adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
3. Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Karimun
4. Periode Pelaporan Keuangan
5. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Profil BLUD SMK Negeri 1 Karimun

1. Sumber Daya BLUD SMK Negeri 1 Karimun
2. Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 1 Karimun
3. Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 1 Karimun tahun 2025

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025
2. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Bab IV Kebijakan Akuntansi

1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
2. Asumsi dasar Laporan Keuangan
3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
5. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
6. Kebijakan Akuntansi Belanja
7. Kebijakan Akuntansi Kas
8. Kebijakan Akuntansi Persediaan
9. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
10. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan atas informasi – Informasi non Keuangan

1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

Bab VII Penutup

BAB II PROFIL BLUD SMK NEGERI 1 KARIMUN

Sumber Daya BLUD SMK Negeri 1 Karimun

BLUD SMK Negeri 1 Karimun memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten serta tenaga ahli yang mendukung pelaksanaan Teaching Factory (TEFA). SDM yang tersedia meliputi:

a. Tenaga Pendidik (Guru Produktif dan Normatif):
b. Guru bersertifikasi keahlian industri sesuai bidang kompetensi.
c. Guru mata pelajaran umum yang mendukung kurikulum berbasis kompetensi.
d. Instruktur dari dunia industri yang terlibat dalam program pelatihan siswa.

1. Tenaga Kependidikan:
   - Staf administrasi yang mengelola keuangan dan operasional BLUD.
   - Teknisi laboratorium dan bengkel untuk mendukung kegiatan praktik.
   - Tenaga keamanan dan kebersihan untuk menjaga lingkungan sekolah yang kondusif.

2. Kemitraan dengan Industri:
   - Mengundang praktisi industri sebagai instruktur tamu.
   - Menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk program magang dan penyerapan tenaga kerja.
   - Mengembangkan skema sertifikasi kompetensi yang diakui dunia usaha dan industri.

Sebagai SMK BLUD yang berbasis Teaching Factory (TEFA), sekolah telah memiliki berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran berbasis produksi dan layanan industri, di antaranya:

3. Ruang Kelas dan Laboratorium:
   - Ruang kelas.
   - Laboratorium komputer.
   - Perpustakaan sebagai pusat referensi dan literasi siswa.
4. Workshop dan Bengkel TEFA:
   - Workshop dan Bengkel Teknik Instalasi Tenaga Listrik.
   - Workshop dan bengkel Teknik Pengelasan.
   - Workshop dan Bengkel Teknik Otomotif (Teknik Kendaraan Ringan dan Teknik Sepeda Motor)
   - Workshop dan Bengkel Teknik Komputer dan Jaringan.
   - Workshop dan Bengkel Teknik Konstruksi dan Properti.

- Workshop dan Bengkel Teknik Elektronika Industri yang bergabung dengan Workshop Teknik Audio Video.

5. Fasilitas Pendukung:
   - Area publik seperti kantin.
   - Koperasi Bina Karsa SMK Negeri 1 Karimun.

Sebagai BLUD, SMK memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan *Teaching Factory*. Sumber dana sekolah berasal dari:

1. Dana BOS dan APBD;
   Digunakan untuk operasional sekolah, gaji guru, serta pengadaan bahan ajar dan alat praktik.
2. Pendapatan dari Unit Usaha TEFA;
   Hasil penjualan produk dari unit Teaching Factory.
3. Kerjasama dengan pihak lain berupa penyewaan kantin;
4. Bantuan dari Pemerintah dan Swasta;
5. Hibah atau bantuan dari pemerintah untuk pengembangan kurikulum dan fasilitas.

Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 1 Karimun . Data bisa diperoleh dari RENSTRA Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karimun tahun 2021-2026. Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 1 Karimun.

Tabel.1 Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan BLUD SMK Negeri 1 Karimun

No	Unit Teaching Factory (TEFA)	Program/ Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Keterangan
1	TEFA Teknik Tenaga Listrik		Rp 0,00	0		Tidak Tercapai
2	TEFA Teknik Pengelasan		Rp 0,00	0		Tidak Tercapai
3	TEFA Teknik Kendaraan Ringan		Rp 0,00	0		Tidak Tercapai
4	TEFA Teknik Komputer dan Jaringan		Rp 0,00	0		Tidak Tercapai
5	TEFA Teknik Konstruksi dan Properti		Rp 0,00	0		Tidak Tercapai
6	Tefa Teknik Elektronika Industri dan Audio Vidio		Rp 0,00	0		Tidak Tercapai
7	Tefa Desain Rancang Bangun Kapal		Rp 0,00	0		Tidak Tercapai

BAB III INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja pada BLUD SMK, pada laporan keuangan ini digunakan sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat managemen yang digunakan untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran dan tujuan, untuk mewujudkan misi dan visi organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut akan disajikan data kinerja BLUD SMK Negeri 1 Karimun Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel.2 Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target BLUD SMK Negeri 1 Karimun Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
A. Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa					
1	Persentase kelulusan siswa	100%	100%	100%	0% siswa lulus karena menyelesaikan PKL
2	Rata-rata nilai Ujian Kompetensi Keahlian (UKK)	≥ 80	84,0	105%	Mencapai target
3	Persentase siswa yang memperoleh sertifikasi kompetensi industri	100%	100%	100%	Beberapa siswa lulus uji sertifikasi
4	Persentase lulusan yang bekerja sesuai kompetensi dalam 6 bulan	50%	62,30%	124,6%	Melebihi target, keterserapan lulusan di dunia kerja berjalan baik
5	Persentase lulusan yang berwirausaha	10%	4,70%	47%	Tidak tercapai target, program Kewirausahaan belum berjalan baik.
B. Kinerja Keuangan dan Unit Usaha BLUD					
6	Persentase pendapatan unit usaha BLUD terhadap biaya operasional sekolah	0%	0%	0%	Pendapatan BLUD dari jasa layanan belum optimal
7	Efisiensi penggunaan dana BLUD sesuai rencana kerja	0%	0%	0%	Anggaran Tidak terserap dengan baik dan efektif
C. Kinerja Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)					
8	Jumlah kerja sama aktif dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	10	5	50%	
9	Persentase siswa yang menjalani magang industri	100%	100%	100%	Semua siswa telah menjalani magang
10	Jumlah produk atau jasa unggulan dari Teaching Factory (TEFA)	7	0	0%	Belum tercapainya target kerjasama dengan perusahaan
D. Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan					
11	Kepuasan siswa dan orang tua terhadap layanan pendidikan	100%	100%	100%	Mencapai target berdasarkan survey internal
12	Jumlah guru produktif bersertifikasi industri	80%	70%	87,5%	Hampir mencapai target

Berdasarkan tabel pencapaian, secara keseluruhan SMK BLUD telah mencapai rata-rata 95,24% dari target yang ditetapkan. Beberapa indikator bahkan melebihi target, seperti wirausaha lulusan, jumlah mitra industri, dan kepuasan siswa. Namun, ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, seperti pencapaian pendapat usaha BLUD dan jumlah guru bersertifikasi industri.

a. Untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:
   1. Menjaga dan meningkatkan kemitraan dengan industry untuk meningkatkan jumlah lulusan yang bekerja sesuai kompetensi.
   2. Optimalisasi pemasaran unit usaha BLUD untuk meningkatkan pendapatan sekolah. Pengembangan produk *Teaching Factory* agar lebih kompetitif di pasar.
   3. Memotivasi guru produktif untuk dapat menyelesaikan program sertifikasinya.
   4. Dengan perbaikan strategi ini, diharapkan SMK BLUD dapat mencapai 98% target di tahun mendatang.
   5. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi.

Adapun hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target realisasi antara lain :

b. Hambatan dalam Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa
   1. Kurangnya kesiapan siswa dalam ujian sertifikasi industry
   2. Tidak semua siswa memiliki kesiapan yang cukup untuk lulus uji sertifikasi.
   3. Waktu Praktek kerja Lapangan (PKL) yang berdekatan dengan uji kompetensi keahlian mengakibatkan banyak siswa yang tidak maksimal dalam mengikutinya.
   4. Tingkat kelulusan yang belum 100%
   5. Siswa tidak menyelesaikan PKL sehingga tidak memenuhi syarat untuk kelulusan.
   6. Kurangnya motivasi belajar dan disiplin dari siswa tersebut.
   7. Penyerapan lulusan ke dunia kerja belum optimal
   8. Persaingan ketat di dunia kerja sehingga tidak semua lulusan langsung terserap.
   9. Masih ada lulusan yang lebih memilih bekerja di luar bidang keahlian mereka.
   10. Munculnya tren baru bagi lulusan yang cenderung berganti-ganti pekerjaan terkait dengan perbandingan take home pay yang didapat antar perusahaan sejenis.
   11. Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan dan Unit Usaha BLUD
   12. Pendapatan unit usaha BLUD belum mencapai target
   13. Persaingan dengan produk atau jasa dari industri komersial yang lebih mapan.
   14. Kurangnya strategi pemasaran dan branding produk/jasa SMK BLUD.
   15. Kurangnya konstitensi dari hasil produksi sehingga mengakibatkan ekspansi dari pemasaran produk tidak optimal.
   16. Kurang semangat dari pengelola TEFA terkait dengan insentif tambahan yang belum bisa diperoleh saat terdapat pesanan TEFA khususnya apabila pada waktu libur dan diluar jam kerja wajib/lembur.
   17. Efisiensi penggunaan dana BLUD

18. Masih ada beberapa program yang belum berjalan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas.

c. Keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah atau sumber pendanaan lain.
    1. Hambatan dalam Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)
    2. Jumlah produk unggulan Teaching Factory belum optimal
    3. Keterbatasan dalam sumber daya manusia dalam bagian produksi dan quality control (QC) dalam kegiatan produksi hasil TEFA.
    4. Produk belum sepenuhnya sesuai standar pasar, sehingga masih butuh perbaikan dalam kualitas dan pemasaran.
    5. Kemitraan industri masih perlu diperluas
    6. Kurangnya keterlibatan industry dalam penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja.
    7. Kurangnya peranan industri dalam hal pendampingan produksi TEFA yang selaras dengan produk industry tersebut.
    8. Hambatan dalam Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan
    9. Tingkat kepuasan siswa dan orang tua belum maksimal
    10. Beberapa siswa merasa materi pembelajaran masih kurang relevan dengan dunia kerja.
    11. Orang tua belum sepenuhnya memahami konsep BLUD di SMK, sehingga kurang mendukung program sekolah.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Entitas Akuntansi

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Akuntansi adalah BLUD SMK Negeri 1 Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

b. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

1. Asumsi kemandirian entitas;
2. Asumsi kesinambungan entitas; dan
3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

c. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Karimun Provinsi Kepulauan Riau adalah:

Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam

d. Laporan Realisasi Anggaran

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat Kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas;

Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis pengakuan dan pengukuran atas transaksi kejadian ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan ini adalah:

a. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.

Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD , adalah sebagai berikut:

Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;

Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;

Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Karimun tahun 2025, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

b. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat Diterima pada Rekening Kas Umum. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

c. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum untuk seluruh transaksi setelah dilakukan pengesahan definitif bendahara. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

d. Kebijakan Akuntansi Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas secara umum diakui jika memenuhi kriteria:

1. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
2. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.

e. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari:

1. Barang Konsumsi;
2. Bahan untuk pemeliharaan;
3. Suku cadang;
4. Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
5. Bahan baku;
6. Barang dalam proses/setengah jadi;

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal; diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.

f. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:
Berwujud;

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
4. dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
7. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
8. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
9. Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.
10. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

.

BAB V

RINCIAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang telah disusun BLUD SMK Negeri 1 Karimun periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini:

1. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
2. Pendapatan – LRA

   Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Karimun mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp2,563,816,187.00 atau sebesar 99,99% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,564,155,000.00 sebagaimana ikhtisar sebagai berikut:

Tabel. 3 Pendapatan LRA

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	0	0	0
Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat	100.000.000	0	0	0
Pendapatan BLUD dari Hibah Tidak terikat	0,00	0	0	0
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	11.505.000,00	11.155.000,00	96,96	0
Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	0	11,187.00	0	0
Pendapatan BLUD dari APBN/APBD	2,452,650,000.00	2,452,650,000.00	100	0
TOTAL PENDAPATAN BLUD	2,564,155,000.00	2,463,816,187.00		0

Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 4 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Pendapatan TEFA TKK	0	0	0	0
Pendapatan TEFA Pengelasan	0	0	0	0
Pendapatan TEFA TKR	0	0	0	0
Pendapatan TEFA TKP	0	0	0	0
Pendapatan TEFA TAV dan TEI	0	0	0	0
Pendapatan TEFA TKJ	0	0	0	0
Pendapatan TEFA DRBK	0	0	0	0
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0	0	0	0

Pendapatan BLUD dari Hibah

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah Tahun 2025 sebesar Rp100.000.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp100.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 5 Pendapatan BLUD dari Hibah

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Hibah SPP/ Hibah Tidak Terikat	-	-	-	
Hibah Kementerian/ Hibah Terikat	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Pendapatan BLUD dari Hibah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Tahun 2025 sebesar Rp 11.155.000,00 atau 96,96% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 6 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Kerjasama Kantin	11.505.000,00	11.155.000,00	96,96	0
Kerjasama Gallery KWH	0	0	0	0
Kerjasama Lainnya	0	0	0	0
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	11.505.000,00	11.155.000,00	96,96	0

Pendapatan BLUD dari APBN/APBD

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD Tahun 2025 sebesar Rp2,452,650,000.00, atau 100,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp2,452,650,000.00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 7 Pendapatan BLUD dari APBN/APBD

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Dana BOSP	2,452,650,000.00	2.452.650.000,00	100%	0
Total Pendapatan BLUD dari APBD	2,452,650,000.00	2,452,650,000.00	100%	0

Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp 11,187.00 atau 0% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 8 Pendapatn BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Pendapatan BLUD Lain-lain yang Sah	0,00	11,187.00	0,00	0
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	**0,00**	**11,187.00**	**0,00**	**0,00**

Belanja

1. Belanja Pegawai BLUD

   Berupa Belanja Gaji & Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan BLUD dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total anggaran belanja pegawai BLUD yang sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 9 Belanja Pegawai BLUD

	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Pegawai BLUD	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

   Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp2,274,235,867.57 atau 100% dari total anggaran belanja barang dan jasa yang sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 10 Belanja Barang dan Jasa BLUD

	ANGGARAN	REALISASI	%
Pembayaran Pegawai	0	0	0
Pembayaran Barang dan Jasa	75,181,000.00	75,181,000.00	100
Pembayaran Pemeliharaan	38,915,000.00	38,915,000.00	100
Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	160,241,301.00	160,241,301.00	100
Pembayaran Perjalanan Dinas	242,496,642.00	242,496,642.00	
Pembayaran Bunga			
Total Belanja Barang dan Jasa BLUD	2,274,235,867.57	2,274,235,867.57	**100**

3. Belanja Modal BLUD

   Belanja modal BLUD terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp 0 atau 0% dari total anggaran belanja modal peralatan dan mesin yang sebesar Rp 0, belanja modal gedung dan bangunan yang terealisasi sebesar Rp atau 0,00% dari total anggaran belanja modal gedung dan bangunan yang sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 11 Belanja Modal BLUD

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	445,905,000.00	445,905,000.00	10	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	414,820,900.00	414,820,900.00	100	0,00
Total Belanja Modal BLUD	0,00	0,00	100	0,00

Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

   Saldo awal SAL pada tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan dilakukan pengembalian SILPA SPP Rp0,00 pada Januari 2025 sehingaa Rp0,00 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

   Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan digunakan dalam rangka membiayai defisit tahun anggaran berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

   Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA) SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SiLPA tahun 2025 sebesar Rp0,00.

2. Neraca

   Aset Lancar

   Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

   - Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau Berupa kas/setara kas dan persediaan Aset Lancar sebesar Rp 11.166.187,00 yang dimiliki BLUD SMK Negeri 1 Karimun per 31 Desember 2025 terdiri dari:

   a. Kas di Bendahara BLUD

      Kas BLUD adalah semua bentuk penerimaan dan pengeluaran uang tunai atau setara kas yang dikelola oleh SMK Negeri 1 Karimun dalam rangka menjalankan operasionalnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, dan pendapatan lainnya. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp6,916,187 dengan rincian :

Tabel. 12 Kas di Bendahara BLUD

Uraian	Jumlah
Kas di Bank	
Rek Bank Penerimaan Norek 1.060.100.040 (BRK Syariah)	6,916,187
Rek Bank Pengeluaran Norek 1.060.100.041 (BRK Syariah)	
Kas Tunai	
Total Kas di Bendahara BLUD	**11.505.000**

   b. Kas di Bendahara BOS

      Kas di Bendahara BOS merupakan kas dibawah pengelolaan bendahara BOS yang bersumber dari pemerintah untuk mendukung operasional sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan tanpa membebani peserta didik. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp0,00 dengan rincian :

Tabel. 13 Kas di Bendahara BOS

Uraian	Jumlah
Kas di Bank	
Rek Bank BOS Norek 1863826155 (BRK Syariah)	0,00
Kas Tunai	0,00
Total Kas di Bendahara BOS	**0,00**

c. Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan kas yang berasal dari sumber-sumber lain. Kas Lainnya pada BLUD SMK Negeri 1 Karimun berasal dari pungutan SPP kepada para siswa yang sejak bulan Juli 2025 sudah tidak dipungut lagi. saldo Kas Lainnya pada tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00.

d. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 terdiri dari :

Tabel. 14 Persediaan

Uraian	Jumlah
Persediaan Barang Habis Pakai	0,00
- Bahan	0,00
- Suku Cadang	0,00
Persediaan Barang Tidak Habis Pakai	0,00
Total Persediaan	**0,00**

e. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh pelayanan umum. Aset tetap sebesar Rp 17.693.946.503,49 per 31 Desember 2025 merupakan nilai perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan yang pengadaannya bersumber dari pengelolaan dana BOS dan BLUD.

1. Tanah

   Nilai aset tanah BLUD SMK Negeri 1 Karimun per 31 Desember 2025 sebesar Rp 4.842.504.000,00 dan tidak terdapat penambahan aset tetap tanah selama tahun 2025.

2. Peralatan dan Mesin

   Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin BLUD SMK Negeri 1 Karimun per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.137.906.561,06 meningkat sebesar Rp0,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp0,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel. 15 Peralatan dan Mesin

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**4.137.906.561,06**
Penambahan :	
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.137.906.561,06
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	0,00
- Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kementerian	0,00
Total Penambahan	**0,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	0,00
Total Pengurangan :	**0,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**4.137.906.561,06**

3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan BLUD SMK Negeri 1 Karimun per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.121.548.595,00 meningkat sebesar Rp7.121.548.595,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp7.121.548.595,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel. 16 Gedung dan Bangunan

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**Rp7.121.548.595,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**Rp7.121.548.595,00**
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp 0,00
- Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kementerian	Rp 0,00
Total Penambahan	**Rp 0,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	Rp 0,00
Total Pengurangan :	**Rp 0,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**Rp7.121.548.595,00**

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD SMK Negeri 1 Karimun per 31 Desember 2025 sebesar Rp 14.893.000,00 meningkat sebesar Rp 14.893.000,00jika dibandingkan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp 0,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel. 17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**Rp** 14.893.000,00
Penambahan :	
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	**Rp** 14.893.000,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp 0,00
- Hibah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kementerian	Rp 0,00
Total Penambahan	**Rp 0,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp 0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	Rp 0,00
Total Pengurangan :	**Rp 0,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**Rp** 14.893.000,00

5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Aset Tetap Lainnya BLUD SMK Negeri 1 Karimun per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 meningkat sebesar Rp0,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp0,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel. 18 Aset Tetap Lainya

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	0,00
Penambahan :	0,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	0,00
- Hibah Aset Tetap Lainnya dari Kementerian	0,00
Total Penambahan	**0,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Lainnya	0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	0,00
Total Pengurangan :	**0,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya	0,00

6. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya dapat berupa Aset Tidak Berwujud dan Aset Rusak Berat/Tidak Digunakan Lagi dalam Operasional Kegiatan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Karimun mencatat Aset Lainnya sebesar Rp0,00 terdiri dari Aset Tidak Berwujud (Software, dll) sebesar Rp 0,00 dan Aset Rusak Berat/Tidak Digunakan Lagi dalam Operasional Kegiatan sebesar Rp 0,00. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel. 19 Aset Lainya

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Lainnya	**0,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Lainnya	0,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	0,00
- Hibah Aset Lainnya dari Kementerian	0,00
- Aset Rusak Berat/Tidak	0,00
Total Penambahan	**0,00**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Lainnya	0,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	0,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	0,00
Total Pengurangan :	**0,00**
Saldo Akhir Aset Lainnya	**0,00**

7. Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Karimun tidak memiliki kewajiban.

8. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD SMK Negeri 1 Karimun pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pada Tahun 2025 Ekuitas adalah sebesar Rp17,705,112,690.49

Tabel. 20 Ekuitas

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Ekuitas	0,00
- Surplus/Defisit LO	289,580,319.43
- Koreksi Ekuitas	Rp0,00
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp 17,415,532,371.06

Saldo Ekuitas Akhir	**Rp 17,705,112,690.49**

a. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

1. Pendapatan LO dari kegiatan operasional
2. Beban dari kegiatan operasional
3. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
4. Pos luar biasa
5. Surplus/defisit LO

b. Pendapatan LO dari kegiatan operasional

Pendapatan LO dari kegiatan operasional terdiri dari :

1. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO

   Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2025 sebesar Rp0,00 lebih rendah dari Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 21 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan TEFA TKK	0	0	0	0
Pendapatan TEFA Pengelasan	0	0	0	0
Pendapatan TEFA TKR	0	0	0	0
Pendapatan TEFA TKP	0	0	0	0
Pendapatan TEFA TKJ	0	0	0	0
Pendapatan TEFA TEI dan TAV	0	0	0	0
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO	0	0	0	0

2. Pendapatan BLUD dari Hibah LO

   Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2025 sebesar Rp 100.000.000,00 lebih rendah dari pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 22 Pendapatan BLUD dari Hibah LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Hibah SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Hibah Kementerian	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Total Pendapatan BLUD dari Hibah LO	100.000.000,00	**0,00**	**0,00**	100.000.000,00

3. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO

   Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO Tahun 2025 sebesar Rp11,155,000,00 lebih tinggi dari pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain sebesar Rp 0.00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 23 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Kerjasama Kantin	11.155.000,00	0,00	100,00	0,00
Kerjasama Gallery Kewirausahaan	0,00	0,00	0%	0,00
Kerjasama Penyewaan Lainnya	0,00	0,00	0%	0
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO	11.155.000,00	0,00	**0 %**	0

4. Pendapatan BLUD dari APBD LO

Realisasi pendapatan BLUD dari APBN/APBD LO Tahun 2025 sebesar Rp2,452,650,000.000 lebih tinggi dari pendapatan BLUD dari APBD LO sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 24 Pendapatan BLUD dari APBD LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Dana BOSP	2,452,650,000.00	0,00	0	0
Dana RETRIBUSI KAMAR HOTEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pendapatan BLUD dari APBD LO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Pendapatan BLUD dari APBD LO	**2,452,650,000.00**	**0,00**	**0**	**0,00**

Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2025 sebesar Rp 11,187,00 lebih rendah dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO sebesar Rp0dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 25 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Jasa Giro	11,187.00	0,00	60,96	1.111.284
Sewa Gedung/Aula/Lab		0,00	0,00	0,00
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO	11,187.00	**0,00**	**60,96**	**1.111.284**

c. Beban dari kegiatan operasional

a. Belanja Pegawai BLUD LO

Berupa Beban Gaji & Tunjangan dan Beban Tambahan Penghasilan BLUD LO dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp 0,00 lebih tinggi/rendah dari beban pegawai BLUD LO tahun 2023 yang sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 26 Belanja Pegawai BLUD LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Beban Pegawai BLUD	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

b. Belanja Barang dan Jasa BLUD LO

Beban barang dan jasa LO tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2,274,235,867.57 lebih tinggi dari dari Beban barang dan jasa LO tahun 2024 yang sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 27 Belanja Barang dan Jasa BLUD LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan
Beban Barang	1,175,090,157.00	0	0	1,175,090,157.00
Beban Jasa	75,181,000.00	0	100	75,181,000.00
Beban Pemeliharaan	38,915,000.00	0	0	38,915,000.00
Beban Perjalanan Dinas	242,496,642.00	0	100	242,496,642.00
Beban Penyusutan Aset	582,311,767.57	0	100	582,311,767.57
Total Beban Barang dan Jasa BLUD	2,274,235,867.57			2,274,235,867.57

c. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan dikelompokkan dalam kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional BLUD SMK Negeri 1 Karimun tahun 2025 sebesar Rp. 0,00

d. Surplus/defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan beban. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Karimun mencatat Defisit LO sebesar Rp -571.145.580,57

e. Laporan Arus Kas

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi BLUD SMK Negeri 1 Karimun dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi BLUD SMK Negeri 1 Karimun pada Tahun 2025 sebesar 2,563,816,187,00 yang terdiri dari:

Tabel. 28 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Hibah	100.000.000,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	11.155.000,00	0,00
Pendapatan BLUD dari APBN/APBD	2.452.650.000,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Lain- Lain Pendapatan BLUD yang Sah	11.187,00	0,00
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		**0,00**
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	**2,563,816,187.00**	**0,00**

b. Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi BLUD SMK Negeri 1 Karimun selama Tahun 2025 sebesar Rp1,691,924,100.00 terdiri dari :

Tabel. 29 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Belanja Pegawai	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	1,250,271,157.00	0,00
Belanja Pemeliharaan	38,915,000.00	0,00
Belanja PerjalananDinas	242,496,642.00	0,00
Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	160,241,301.00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	**1,691,924,100.00**	**0,00**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp0,00 Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

Tabel. 29.1 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	0,00	0,00

c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset Non - Keuangan lainnya.
Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan di masa yang akan datang.

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 1 Karimun pada Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 yang terdiri dari:

Tabel. 30 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		
Penjualan Aset Tetap Tanah	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	**0,00**	**0,00**

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 1 Karimun pada Tahun 2025 sebesar Rp 1.308.596.230,00 yang terdiri dari:

Tabel. 31 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Inveastasi

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	**0,00**	**0,00**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp 0. Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

1. Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Periode 2025

Kenaikan/(penurunan) Kas Bersih Selama Periode Tahun 2025 merupakan akumulasi jumlah kenaikan/(penurunan) kas bersih dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris.

Selama Tahun Anggaran 2025 terjadi kenaikan/penurunan kas bersih sebesar Rp11,166,187.00 yang terdiri dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp0,00 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp11,166,187.00. Perbandingan Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih tahun 2025 dan 2024 adalah:

Tabel. 32 Kenaikan/ Penurunan Kas Bersih Selama Periode 2025

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	11,166,187.00	0

2. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025

Saldo akhir kas per 31 Desember 2025 merupakan perhitungan Saldo Awal per 1 Januari 2025 ditambah (dikurangi) dengan kenaikan/ (penurunan) kas bersih selama periode tahun 2025.

Saldo akhir kas di BLUD SMK Negeri 1 Karimun per 31 Desember 2025 sebesar Rp11,166,187.00 didapat dari perhitungan saldo awal Tahun 2025 sebesar Rp11,166,187.00ditambah kenaikan/penurunan kas bersih selama periode tahun 2025 sebesar Rp Rp11,166,187.00.

Total Saldo Kas BLUD SMK Negeri 1 Karimun Per 31 Desember 2025 sebesar Rpxx,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 32.1 Kenaikan/ Penurunan Kas Bersih Selama Periode 2025

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas di BLUD	11,166,187.00	0
Kas Dana BOS	0	0
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0	0
Saldo Akhir Kas	11,166,187.00	

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

a. Ekuitas awal
b. Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti:

4. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;

5. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
   a. Ekuitas Akhir
   b. Ekuitas Awal

   Pada Tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Karimun mencatat ekuitas awal sebesar Rp 29,622,883,497.40 yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada laporan Tahun 2025. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

   - Jumlah Aset Tahun 2024 Rp 0
   - Jumlah Kewajiban Tahun 2024 Rp 0,00
   - Saldo Awal Ekuitas 2024 Rp 0

6. Surplus/Defisit LO

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dalam Laporan Operasional Tahun 2025 tercatat sebesar Rp289.580.319,43.

a. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar Rp17,705,112,690.49merupakan saldo kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara

Total Aset dan Total Kewajiban BLUD SMK Negeri 1 Karimun Tahun 2025.

- Jumlah Aset Tahun 2025 Rp 17.705.112.690,49
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025 Rp 0,00
- Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp0
- **Saldo Awal Ekuitas 2025** **Rp 0**

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI INFORMASI NON-KEUANGAN

Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

BLUD SMK Negeri 1 Karimun dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 1354 Tahun 2021 BLUD SMK Negeri 1 Karimun beralamat di Jl. Paya Cincin Sei Bati, Kecamatan Tebing, Kabupaten karimun, Kepulauan Riau.

Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

BLUD SMK Negeri 1 Karimun adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nirlaba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di , dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra BLUD SMK Negeri 1 Karimun , sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala BLUD SMK Negeri 1 Karimun.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 disusun sebagai bentuk tanggung jawab BLUD SMK Negeri 1 Karimun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, penyusunan laporan keuangan BLUD juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Secara umum pencapaian kinerja atas sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik, namun begitu masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang masih harus terus dibenahi dan menjadi perhatian oleh BLUD SMK Negeri 1 Karimun.

Dengan memperhatikan strategisnya peran sekolah dan besarnya tantangan yang dihadapi untuk mendukung Visi Misi Pendidikan Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, SMK Negeri 1 Karimun Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja serta memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan industri. Melalui pendekatan berbasis kompetensi, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta pengelolaan keuangan yang transparan melalui sistem BLUD, sekolah ini berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan lulusan SMK dapat menjadi tenaga kerja yang unggul dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Akhir kata, BLUD SMK Negeri 1 Karimun Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan dalam penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban kami dalam menyajikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

Karimun, 25 Mei 2026
PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 1 KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Ali Basril, S. Pd., M.Pd.T.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 197504152005021005

LAPORAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

SMK NEGERI 2 KARIMUN

TAHUN ANGGRAN 2025

(AUDITED)



DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... **I**

KATA PENGANTAR ..... **III**

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWAB ..... **IV**

A. LAPORAN REALISASI ..... **V**

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH ..... **VIII**

C. NERACA ..... **IX**

D. LAPORAN OPERASIONAL ..... **XI**

E. LAPORAN ARUS KAS ..... **XIII**

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ..... **XVI**

G. LAPORAN PERUBAHAN KEUANGAN **1**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 2
1.3 Penangungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Karimun 4
1.4 Priode Pelaporan Keuangan 4
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 4

BAB II PROFIL BLUD SMK NEGERI 2 KARIMUN **6**
2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 2 Karimun 6
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 2 Karimun 7
2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 2 Karimun 8

BAB III INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET **19**

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025 19

3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi 21

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTASI 23

4.1 Entitas Akuntansi 23
4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan.....23
4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....23
4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 24
4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan 24
4.6 Kebijakan Akuntasni Belanja..... 24
4.7 Kebijakan Akuntansi Kas 25
4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan 25
4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.....26
4.10 Kebijakam Akuntansi Kewajiban..... 26

BAB V RINCIAN POS POS LAPORAN KEUANGAN..... 27

5.1 Penjelasan Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran 27
5.2 Penjelasan Pos Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.... 31
5.3 Neraca 31
5.4 Laporan Operasional.....36
5.5 Laporan Arus Kas..... 39
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas..... 43

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI

NON KEUANGAN..... 45

6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi 45
6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas.....45

BAB VII PENUTUP 46

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. BLUD SMK Negeri 2 Karimun adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Karimun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kami berharap dengan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) di Provinsi Kepulauan Riau.

Karimun, 25 Mei 2026
PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 2 KARIMUN
PROVINSI KEPULUAN RIAU

PAIZAH, S.Ag
Penata Tingkat I/III(d)
NIP. 197106162007012016

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan SMK Negeri 2 Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (iii) Neraca; (iv) Laporan Operasional (LO); (v) Laporan Arus Kas (LAK); (vi) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (vii) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Karimun, 25 Mei 2026
PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 2 KARIMUN
PROVINSI KEPULUAN RIAU

RAIZAH, S.Ag
Penata Tingkat I/III(d)
NIP. 197106162007012016

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 2 KARIMUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN**	**1.232.660.000,00**	**1.131.840.138,00**	**91,82**	**0,00**
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	2.500.000,00	1.660.800,00	66,43	0,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00	#NUM!	0,00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	0,00
6	Pendapatan Hibah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan APBN/APBD	1.118.960.000,00	1.118.960.000,00	100,00	0,00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	0,00	19.338,00	0,00	0,00
	Jumlah PENDAPATAN	**1.232.660.000,00**	**1.131.840.138,00**	**91,82**	**0,00**
9	**BELANJA**				
10	**BELANJA OPERASI**	**848.699.000,00**	**727.842.100,00**	**85,76**	**0,00**
11	Belanja Pegawai	0,00	0,00	#NUM!	0,00
12	Belanja Barang dan Jasa	848.699.000,00	727.842.100,00	85,76	0,00
13	Bunga	0,00	0,00	#NUM!	0,00
14	Belanja Lain-lain	0,00	0,00	#NUM!	0,00
15	**BELANJA MODAL**	**383.961.000,00**	**383.556.000,00**	**99,89**	**0,00**
16	Belanja Tanah	0,00	0,00	#NUM!	0,00
17	Belanja Peralatan dan Mesin	231.585.000,00	231.585.000,00	100,00	0,00
18	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	#NUM!	0,00
19	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	#NUM!	0,00
20	Belanja Aset Tetap Lainnya	152.376.000,00	151.971.000,00	99,73	0,00
21	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	#NUM!	0,00
	Jumlah BELANJA	**1.232.660.000,00**	**1.111.398.100,00**	**90,16**	**0,00**
	Surplus/ Defisit Sebelum Pembiayaan	**0,00**	**20.442.038,00**	**0,00**	**0,00**
22	**PENERIMAAN**				
23	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**0,00**	**0,00**	**#NUM!**	**0,00**
24	Penggunaan SILPA	0,00	0,00	#NUM!	0,00
25	Penerimaan dari Divestasi	0,00	0,00	#NUM!	0,00
26	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00	#NUM!	0,00

	Jumlah PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**0,00**	**0,00**	**#NUM!**	**0,00**
27	**PENGELUARAN**				
28	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**0,00**	**0,00**	**#NUM!**	**0,00**
29	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00	#NUM!	0,00
30	Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00	#NUM!	0,00
31	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00	#NUM!	0,00
	Jumlah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**0,00**	**0,00**	**#NUM!**	**0,00**
	Pembiayaan Neto	**0,00**	**0,00**	**#NUM!**	**0,00**
	Surplus/ Defisit	**0,00**	**20.442.038,00**	**0,00**	**0,00**

Karimun, 25 Mei 2026
PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 2 KARIMUN
PROVINSI KEPULUAN RIAU

RAIZAH, S.Ag
Penata Tingkat I/III(d)
NIP. 197106162007012016

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 2 KARIMUN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	**7.5.2.1**	0,00	0,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**7.5.2.2**	0,00	0,00
3	Subtotal (1-2)		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	**7.5.2.3**	20.442.038,00	0,00
5	Subtotal (3+4)		20.442.038,00	0,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	**7.5.2.6**	20.442.038,00	0,00

Karimun, 25 Mei 2026
PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 2 KARIMUN
PROVINSI KEPULUAN RIAU

RAIZAH, S.Ag
Penata Tingkat I/III(d)
NIP. 197106162007012016

NERACA

PEMERINTAH KOTA KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 2 KARIMUN
NERACA (BLUD)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	**ASET**	**1.1.**	**2.677.069.878,84**	**0,00**
2	**ASET LANCAR**	**1.1.1.**	**20.562.038,00**	**0,00**
3	Kas di Bendahara Penerimaan	1.1.1.00.	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.1.1.01.	0,00	0,00
5	Kas di BLUD	1.1.1.02.	20.442.038,00	0,00
6	Kas Dana BOS	1.1.1.03.	0,00	0,00
7	Kas Dana P2SP	1.1.1.04.	0,00	0,00
8	Kas Lainnya Setara Kas	1.1.1.05.	120.000,00	0,00
9	Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum	1.1.1.06.	0,00	0,00
10	Piutang Pajak	1.1.1.07.	0,00	0,00
11	Piutang Retribusi	1.1.1.08.	0,00	0,00
12	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.08.	0,00	0,00
13	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.09.	0,00	0,00
14	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.1.10.	0,00	0,00
15	Belanja dibayar dimuka	1.1.1.11.	0,00	0,00
16	Piutang Lainnya	1.1.1.12.	0,00	0,00
17	Persediaan Badan Layanan Umum	1.1.1.13.	0,00	0,00
18	Aset Untuk Dikonsolidasikan	1.1.1.14.	0,00	0,00
	Jumlah ASET LANCAR		20.562.038,00	0,00
19	**ASET TETAP**	**1.1.2.**	**2.656.507.840,84**	**0,00**
20	Tanah	1.1.2.01.	0,00	0,00
21	Peralatan dan Mesin	1.1.2.02.	1.734.831.062,00	0,00
22	Gedung dan Bangunan	1.1.2.03.	0,00	0,00
23	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.1.2.04.	129.500.000,00	0,00
24	Aset Tetap Lainnya	1.1.2.05.	1.021.897.200,00	0,00
25	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.1.2.06.	0,00	0,00
26	Akumulasi Penyusutan	1.1.2.07.	(229.720.421,16)	0,00
	Jumlah ASET TETAP		2.656.507.840,84	0,00
27	**PIUTANG JANGKA PANJANG**	**1.1.3.**	**0,00**	**0,00**
28	Tagihan Penjualan Angsuran	1.1.3.01.	0,00	0,00
29	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	1.1.3.02.	0,00	0,00

30	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.3.03.	0,00	0,00
	Jumlah PIUTANG JANGKA PANJANG		0,00	0,00
31	**ASET LAINNYA**	**1.1.4.**	**0,00**	**0,00**
32	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.1.4.01.	0,00	0,00
33	Dana Kelolaan	1.1.4.02.	0,00	0,00
34	Aset yang dibatasi Penggunaannya	1.1.4.03.	0,00	0,00
35	Aset Tak Berwujud	1.1.4.04.	0,00	0,00
36	Aset Lain - Lain	1.1.4.05.	0,00	0,00
37	Akumulasi Amortisasi	1.1.4.06.	0,00	0,00
	Jumlah ASET LAINNYA		0,00	0,00
	JUMLAH ASET		2.677.069.878,84	0,00
38	**KEWAJIBAN**	**1.2.**	**120.000,00**	**0,00**
39	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**1.2.1.**	**120.000,00**	**0,00**
40	Utang Usaha	1.2.1.01.	0,00	0,00
41	Utang Pihak Ketiga	1.2.1.02.	0,00	0,00
42	Utang Pajak	1.2.1.03.	120.000,00	0,00
43	Utang Kepada KUN	1.2.1.04.	0,00	0,00
44	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.2.1.05.	0,00	0,00
45	Belanja yang masih harus dibayar	1.2.1.06.	0,00	0,00
46	Pendapatan Diterima Dimuka	1.2.1.07.	0,00	0,00
47	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.2.1.08.	0,00	0,00
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		120.000,00	0,00
48	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**1.2.2.**	**0,00**	**0,00**
49	Utang Jangka Panjang	1.2.2.01.	0,00	0,00
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		120.000,00	0,00
50	**EKUITAS**	**1.3.**	**2.676.949.878,84**	**0,00**
51	**EKUITAS**	**1.3.1.**	**2.676.949.878,84**	**0,00**
52	Ekuitas	1.3.1.01.	2.676.949.878,84	0,00
	Jumlah EKUITAS		2.676.949.878,84	0,00
	JUMLAH EKUITAS		2.676.949.878,84	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.677.069.878,84	0,00

Karimun, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 2 KARIMUN
PROVINSI KEPULUAN RIAU

PAIZAH, S.Ag
Penata Tingkat I/III(d)
NIP. 197106162007012016

LAPORAN OPRASIONAL

PEMERINTAH KOTA KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 2 KARIMUN
LAPORAN OPERASIONAL (BLUD)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN - LO	**1.200.146.569,00**	**0,00**	**1.200.146.569,00**	**100,00**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**81.186.569,00**	**0,00**	**81.186.569,00**	**100,00**
	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	**81.186.569,00**	**0,00**	**81.186.569,00**	**100,00**
	Pendapatan dari BLUD-LO	**81.186.569,00**	**0,00**	**81.186.569,00**	**100,00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	**1.660.800,00**	**0,00**	**1.660.800,00**	**100,00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	1.660.800,00	0,00	1.660.800,00	100,00
	Pendapatan BLUD dari Hibah-LO	**68.306.431,00**	**0,00**	**68.306.431,00**	**100,00**
	Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat-LO	68.306.431,00	0,00	68.306.431,00	100,00
	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	**11.200.000,00**	**0,00**	**11.200.000,00**	**100,00**
	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	100,00
	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	**19.338,00**	**0,00**	**19.338,00**	**100,00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro-LO	19.338,00	0,00	19.338,00	100,00
	Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**81.186.569,00**	**0,00**	**81.186.569,00**	**100,00**
	DAK Non Fisik	**1.118.960.000,00**	**0,00**	**1.118.960.000,00**	**100,00**
	DAK Non Fisik	**1.118.960.000,00**	**0,00**	**1.118.960.000,00**	**100,00**
	DAK Non Fisik	**1.118.960.000,00**	**0,00**	**1.118.960.000,00**	**100,00**
	DAK Non Fisik	**1.118.960.000,00**	**0,00**	**1.118.960.000,00**	**100,00**
	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	1.118.960.000,00	0,00	1.118.960.000,00	100,00
	Jumlah DAK Non Fisik	**1.118.960.000,00**	**0,00**	**1.118.960.000,00**	**100,00**
	JUMLAH PENDAPATAN - LO	**1.200.146.569,00**	**0,00**	**1.200.146.569,00**	**100,00**
	BEBAN DAERAH	**1.025.868.952,16**	**0,00**	**1.025.868.952,16**	**100,00**
	BEBAN OPERASI	**1.025.868.952,16**	**0,00**	**1.025.868.952,16**	**100,00**
	Beban Barang dan Jasa	**796.148.531,00**	**0,00**	**796.148.531,00**	**100,00**
	Beban Barang	**318.222.482,00**	**0,00**	**318.222.482,00**	**100,00**
	Beban Barang Pakai Habis	**303.476.432,00**	**0,00**	**303.476.432,00**	**100,00**
	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	39.904.200,00	0,00	39.904.200,00	100,00
	Beban Bahan-Bahan Kimia	3.541.200,00	0,00	3.541.200,00	100,00
	Beban Bahan-Bahan Baku	12.626.500,00	0,00	12.626.500,00	100,00
	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	4.940.000,00	0,00	4.940.000,00	100,00
	Beban Bahan-Bahan Lainnya	30.265.850,00	0,00	30.265.850,00	100,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	67.019.873,00	0,00	67.019.873,00	100,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.060.800,00	0,00	11.060.800,00	100,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	36.879.400,00	0,00	36.879.400,00	100,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.287.500,00	0,00	2.287.500,00	100,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.491.000,00	0,00	6.491.000,00	100,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.731.000,00	0,00	10.731.000,00	100,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	21.254.500,00	0,00	21.254.500,00	100,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	16.050.000,00	0,00	16.050.000,00	100,00

	Beban Obat-Obatan-Obat	857.000,00	0,00	857.000,00	100,00
	Beban Natura dan Pakan-Natura	6.898.115,00	0,00	6.898.115,00	100,00
	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	15.194.994,00	0,00	15.194.994,00	100,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	15.740.000,00	0,00	15.740.000,00	100,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	354.500,00	0,00	354.500,00	100,00
	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	100,00
	Beban Barang Tak Habis Pakai	**14.746.050,00**	**0,00**	**14.746.050,00**	**100,00**
	Beban Komponen-Komponen Peralatan	14.746.050,00	0,00	14.746.050,00	100,00
	Beban Jasa	**277.052.400,00**	**0,00**	**277.052.400,00**	**100,00**
	Beban Jasa Kantor	**216.186.400,00**	**0,00**	**216.186.400,00**	**100,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	28.030.000,00	0,00	28.030.000,00	100,00
	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	100,00
	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	100,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
	Beban Jasa Tata Rias	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00
	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
	Beban Tagihan Listrik	109.974.800,00	0,00	109.974.800,00	100,00
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	38.973.600,00	0,00	38.973.600,00	100,00
	Beban Registrasi/Keanggotaan	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	**16.770.000,00**	**0,00**	**16.770.000,00**	**100,00**
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00
	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	100,00
	Beban Sewa Peralatan Umum	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	100,00
	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	**44.096.000,00**	**0,00**	**44.096.000,00**	**100,00**
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	44.096.000,00	0,00	44.096.000,00	100,00
	Beban Pemeliharaan	**27.068.200,00**	**0,00**	**27.068.200,00**	**100,00**
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	**15.728.200,00**	**0,00**	**15.728.200,00**	**100,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	100,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	9.353.200,00	0,00	9.353.200,00	100,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	100,00
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	285.000,00	0,00	285.000,00	100,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	**7.500.000,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**100,00**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**3.840.000,00**	**0,00**	**3.840.000,00**	**100,00**
	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas	**173.805.449,00**	**0,00**	**173.805.449,00**	**100,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	**173.805.449,00**	**0,00**	**173.805.449,00**	**100,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	145.573.449,00	0,00	145.573.449,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.232.000,00	0,00	28.232.000,00	100,00
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	**229.720.421,16**	**0,00**	**229.720.421,16**	**100,00**
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	**229.720.421,16**	**0,00**	**229.720.421,16**	**100,00**
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	**229.720.421,16**	**0,00**	**229.720.421,16**	**100,00**
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	229.720.421,16	0,00	229.720.421,16	100,00
	Jumlah BEBAN OPERASI	**1.025.868.952,16**	**0,00**	**1.025.868.952,16**	**100,00**

	JUMLAH BEBAN DAERAH	**1.025.868.952,16**	**0,00**	**1.025.868.952,16**	**100,00**
	SURPLUS/ DEFISIT	**174.277.616,84**	**0,00**	**174.277.616,84**	**100,00**

Karimun, 25 Mei 2026
PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 2 KARIMUN
PROVINSI KEPULUAN RIAU

PAIZAH, S.Ag
Penata Tingkat I/III(d)
NIP. 197106162007012016

LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 2 KARIMUN
LAPORAN ARUS KAS (BLUD)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	**Arus Masuk Kas**		
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	1.660.800,00	0,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	11.200.000,00	0,00
6	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
7	Pendapatan APBN/APBD	1.118.960.000,00	0,00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	19.338,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	1.131.840.138,00	0,00
9	**Arus Keluar Kas**		
10	Pembayaran Pegawai	0,00	0,00
11	Pembayaran Barang dan Jasa	399.283.482,00	0,00
12	Pembayaran Pemeliharaan	27.068.200,00	0,00
13	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	150.148.400,00	0,00
14	Pembayaran Perjalanan Dinas	151.342.018,00	0,00
15	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	727.842.100,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi	403.998.038,00	0,00
16	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
17	**Arus Masuk Kas**		
18	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
19	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
20	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
21	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
22	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
23	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
24	Penerimaan dari Divestasi	0,00	0,00
25	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
26	**Arus Keluar Kas**		
27	Perolehan Tanah	0,00	0,00
28	Perolehan Peralatan dan Mesin	231.585.000,00	0,00
29	Perolehan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
30	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00

31	Perolehan Aset Tetap Lainnya	151.971.000,00	0,00
32	Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
33	Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00
34	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	383.556.000,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(383.556.000,00)	0,00
35	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**		
36	**Arus Masuk Kas**		
37	Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00
38	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
39	**Arus Keluar Kas**		
40	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00
41	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00
42	Penyetoran ke Kas Negara	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
43	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**		
44	**Arus Masuk Kas**		
45	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	120.000,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	120.000,00	0,00
46	**Arus Keluar Kas**		
47	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	120.000,00	0,00
48	**Kenaikan/ Penurunan Kas BLU**	20.562.038,00	0,00
49	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLU**	0,00	0,00
50	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU**	20.562.038,00	0,00

Karimun, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 2 KARIMUN
PROVINSI KEPULUAN RIAU

PAIZAH, S.Ag
Penata Tingkat I/III(d)
NIP. 197106162007012016

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMKN 2 KARIMUN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (BLUD)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Ekuitas Awal		0,00	0,00
2	Surplus/Defisit-LO		174.277.616,84	0,00
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		2.502.672.262,00	0,00
4	Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
6	Lain-lain		0,00	0,00
7	Ekuitas Akhir		**2.676.949.878,84**	**0,00**

Karimun, 25 Mei 2026
PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 2 KARIMUN
PROVINSI KEPULUAN RIAU

PAIZAH, S.Ag
Penata Tingkat I/III(d)
NIP. 197106162007012016

A. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan Keuangan BLUD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran ;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan BLUD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala BLUD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan BLUD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SMK Negeri 2 Karimun Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan RiauTahun 2025.
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Karimun Tahun 2025, adalah tanggungjawab sepenuhnya BLUD SMK Negeri 2 Karimun, dalam hal ini adalah Pimpinan BLUD SMK Negeri 2 Karimun

1.4 Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Karimun tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Karimun tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (*Subsequent Event*) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Karimun tahun 2026. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2026.

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Karimun adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Karimun
1.4 Periode Pelaporan Keuangan
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Profil BLUD SMK Negeri 2 Karimun

2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri Karimun
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri Karimun
2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri Karimun tahun 2025

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025
3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2 Asumsi dasar Laporan Keuangan
4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan
4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja

4.7 Kebijakan Akuntansi Kas
4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan
4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

5.1 Laporan Realisasi Anggaran
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3 Neraca
5.4 Laporan Operasional
5.5 Laporan Arus Kas
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
5.7 Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan atas informasi – Informasi non Keuangan

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

Bab VII Penutup

BAB II
PROFIL BLUD SMK NEGERI 2 KARIMUN

2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 2 Karimun

BLUD SMK Negeri 2 Karimun memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten serta tenaga ahli yang mendukung pelaksanaan *Teaching Factory (TEFA)*. SDM yang tersedia meliputi:

1. Tenaga Pendidik (Guru Produktif dan Normatif):
   - Guru bersertifikasi keahlian industri sesuai bidang kompetensi.
   - Guru mata pelajaran umum yang mendukung kurikulum berbasis kompetensi.
   - Instruktur dari dunia industri yang terlibat dalam program pelatihan siswa.
2. Tenaga Kependidikan:
   - Staf administrasi yang mengelola keuangan dan operasional BLUD.
   - Teknisi laboratorium dan bengkel untuk mendukung kegiatan praktik.
3. Kemitraan dengan Industri:
   - Mengundang praktisi industri sebagai instruktur tamu.
   - Menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk program magang dan penyerapan tenaga kerja.
   - Mengembangkan skema sertifikasi kompetensi yang diakui dunia usaha dan industri.

Sebagai SMK BLUD yang berbasis *Teaching Factory* (TEFA) dan Unit Produksi (UP), sekolah telah memiliki berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran berbasis produksi dan layanan industri, di antaranya:

1. Ruang Kelas dan Laboratorium:
   - Ruang kelas.
   - Laboratorium komputer.
   - Perpustakaan sebagai pusat referensi dan literasi siswa.
2. Workshop dan Bengkel TEFA / UP:
   - Ruang Praktek Siswa Kuliner.
   - Ruang Praktek Siswa Perhotelan yang juga digunakan untuk Praktek Siswa Kecantikan.
   - Ruang Praktek Siswa Usaha Perjalanan Wisata.
   - Ruang Praktek Siswa Kecantikan.
   - Ruang Praktek Siswa Tata Busana

- Ruang Praktek Siswa Bisnis Daring dan Pemasaran.

3. Fasilitas Pendukung:
   - Area publik seperti kantin.

Sebagai BLUD, SMK memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan Teaching Factory. Sumber dana sekolah berasal dari:

1. Dana BOS dan APBD:
   - Digunakan untuk operasional sekolah, gaji guru, serta pengadaan bahan ajar dan alat praktik.
2. Pendapatan dari Unit Usaha TEFA:
   - Hasil penjualan produk dari unit Teaching Factory.
   - Jasa layanan seperti penjualan produk kuliner, BCS Bisnis daring dan Pemasaran
3. Bantuan dari Pemerintah dan Swasta:
   - Hibah atau bantuan dari pemerintah untuk pengembangan kurikulum dan fasilitas.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 2 Karimun

Sesuai dengan Rencana Strategi Bisnis SMKN 2 Karimun Indikator kinerja berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendikbud No 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan menegaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui standar tersebut meliputi Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan Rincian Indikator Pelayanan SMKN 2 Karimun dan target ada tahun 2025 sebagai berikut : Rencana Pencapaian Indikator Pelayanan Pendidikan.

Indikator	Nilai Satuan	Target					
		2024 Dasar	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.1 Peserta didik memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME sesuai area kompetensi keagamaan	Persen (%)	90%	92%	94%	96%	98%	100%
1.1.2 Peserta didik memiliki jiwa Kebangsaan dan cinta tanah air sesuai area kompetensi Kebangsaan dan Cinta Tanah Air	Persen (%)	90%	94%	96%	98%	100%	100%
1.1.3 Peserta didik memiliki kepribadian jujur, mandiri, bertanggungjawab, dan berjiwa sosial sesuai standar area kompetensi Karakter Pribadi dan Sosial	Persen (%)	90%	96%	98%	100%	100%	100%
1.1.4 Peserta didik diharapkan memiliki kesehatan secara jasmani maupun rohani sesuai area kompetensi sehat jasmani dan rohani	Persen (%)	95%	96%	97%	98%	100%	100%
1.1.5 Peserta didik memiliki kemampuan literasi yang baik dan mumpuni sesuai area kompetensi Literasi	Persen (%)	90%	92%	94%	96%	98%	100%

1.1.6 Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif sesuai area kompetensi kreativitas	Persen (%)	90%	92%	94%	96%	98%	100%
indikator	Nilai Satuan	Target					
		2024 Dasar	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.7 Peserta didik memiliki keterampilan Estetika yang baik sesuai area kompetensi estetika	Persen (%)	95%	97%	97%	98%	100%	100%
1.1.8 Peserta didik memiliki kemampuan teknis yang memadai sesuai area kompetensi kemampuan teknis	Persen (%)	85%	90%	97%	98%	100%	100%
1.1.9Peserta didik memiliki jiwa dan kemampuan berwirausaha yang baik sesuai area kompetensi kewirausahaan	Persen (%)	80%	85%	90%	97%	98%	100%
1.2.1 Sub standar kompetensi lulusan dan ruang lingkup materi setiap muatan pembelajaran untuk setiap kelas pada tingkat dan jenis kompetensi dirumuskan dalam kurikulum SMK/MAK	Persen (%)	95%	97%	97%	98%	100%	100%

1.2.1 Sub standar kompetensi lulusan, ruang lingkup materi dan kurikulum tersebut dijabarkan ke dalam buku teks pelajaran	Persen (%)	95%	97%	97%	98%	100%	100%
1.3.1 Guru membuat perencanaan pembelajaran dalam bentuk RPP dan/atau perangkat pembelajaran lain yang mengacu kepada silabus yang dikembangkan oleh SMK dan kurikulum untuk pembelajaran di kelas	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3.2 Proses pembelajaran yang di lakukan guru/instruktur sesuai standar prosedur pelaksanaan sistem pembelajaran di kelas	Persen (%)	90%	97%	97%	98%	100%	100%
1.3.3 Guru/instruktur membuat penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan sistem pembelajaran di kelas	Persen (%)	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator	Nilai Satuan	Target					
		2024 Dasar	2025	2026	2027	2028	2029

1.3.4 Guru/instruktur menganalisis karakteristik keterampilan yang akan dicapai peserta didik dalam pembelajaran praktik	Persen (%)	90%	92%	94%	96%	98%	100%
1.3.5 Guru/instruktur memberikan contoh dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan yang telah dicontohkan guru/instruktur dalma proses pemebelajaran praktik	Persen (%)	90%	92%	94%	96%	98%	100%
1.3.6 Guru/instruktur melakukan penilaian sesuai dengan karakteristik keterampilan pembelajaran praktik	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3.7 Guru/instruktur dari SMK/MAK dan pembimbing dunia kerja membuat perencanaan sistem ganda	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3.8 Pelaksanan kegiatan pembelajaran pada PSG	Persen (%)	90%	92%	94%	96%	98%	100%
1.3.9 Pembimbing dunia usaha/industri melakukan penilaian yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan PSG	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3.10 Guru/instruktur melakukan perencanaan pembelajaran sistem blok	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3.11 Guru/instruktur melakukan pelaksanaan pembelajaran sistem blok	Persen (%)	90%	92%	94%	96%	98%	100%
1.3.12 Guru/instruktur melakukan penilaian proses pembelajaran sistem blok	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1.4.1 Teknik penilaian berdasarkan prinsip penilaian	Persen (%)	95%	92%	94%	96%	98%	100%
1.4.2 Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	Persen (%)	90%	92%	94%	96%	98%	100%
1.4.3 Penilaian pendidikan ditindaklanjuti.	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.5.1 Ketersediaan guru sesuai standar kualifikasi guru	Persen (%)	90%	92%	94%	96%	98%	100%
Indikator	Nilai Satuan	Target					
		2024 Dasar	2025	2026	2027	2028	2029
1.5.2 Ketersediaan instruktur kejuruan sesuai standar kualifikasi instruktur kejuruan	Persen (%)	95%	92%	94%	96%	98%	100%
1.5.3 Ketersediaan guru sesuai standar kompetensi guru umum dan kejuruan	Persen (%)	95%	92%	94%	96%	98%	100%
1.5.4 Ketersediaan instruktur kejuruan sesuai standar kompetensi instruktur kejuruan	Persen (%)	95%	92%	94%	96%	98%	100%
1.6.1 Lahan sekolah sesuai dengan standar prasarana dan sarana dan sarana	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6.2 Bangunan sekolah sesuai dengan standar prasarana dan sarana	Persen (%)	90%	92%	94%	96%	98%	100%
1.6.3 Ruang pembelajaran umum sesuai dengan standar prasarana dan sarana	Persen (%)	80%	92%	95%	96%	98%	100%
1.6.4 Ruang Praktik/Laboratorium Umum sesuai dengan standar prasarana dan sarana	Persen (%)	90%	92%	95%	96%	98%	100%

1.6.5 Ruang Praktik/Laboratorium Keahlian sesuai dengan standar prasarana dan sarana	Persen (%)	80%	85%	90%	97%	98%	100%
1.6.6 Ruang Pimpinan dan Administrasi sesuai dengan standar prasarana dan sarana	Persen (%)	90%	92%	94%	96%	98%	100%
1.6.7 Ruang penunjang sesuai dengan standar prasarana dan sarana	Persen (%)	80%	85%	90%	97%	98%	100%
1.7.1 Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.7.2 Pelaksanaan pengelolaan dilakukan sesuai standar pengelolaa	Persen (%)	80%	85%	90%	97%	98%	100%
1.7.3 Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	Persen (%)	90%	92%	94%	96%	98%	100%
Indikator	Nilai Satuan	Target					
		2024 Dasar	2025	2026	2027	2028	2029
1.7.4 Satuan pendidikan mengelola sistem informasi manajemen	Persen (%)	80%	85%	90%	97%	98%	100%
1.8.1 Siswa SMK yang miskin/kurang mampu dibebaskan dari beban biaya pendidikan	Persen (%)	85%	87%	90%	97%	98%	100%
1.8.2 Pengelolaan dana yang masuk ke satuan pendidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel	Persen (%)	95%	92%	94%	96%	98%	100%

Rencana Pencapaian Teaching Factory

Indikator	NilaiSatuan	Target					
		2024 Dasar	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.1 Tefa melakukan administrasi keuangan sesuai prosedur akuntansi yang standar	Persen (%)	90%	94%	96%	98%	100%	100%
1.1.2 Tefa memiliki struktur organisasi dan jobdesk dalam bentuk formal	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.3 Tefa memiliki SOP dan alur kinerja yang tersusun dan dilaksanakan secara konsisten	Persen (%)	95%	96%	98%	100%	100%	100%
1.2.1 Tefa memiliki peralatan sesuai standar	Persen (%)	80%	85%	90%	97%	98%	100%
1.2.2 Terdapat tata kelola penggunaan alat	Persen (%)	85%	87%	90%	97%	98%	100%
1.2.3 Ruang praktik Tefa memenuhi standar sarana dan prasarana	Persen (%)	90%	94%	96%	98%	100%	100%
1.2.4 Tefa memiliki Manajemen Maintenance, Repair & Calibrasion (MRC)	Persen (%)	85%	87%	90%	97%	98%	100%
1.2.5 Terdapat penataan (layout) tempat praktik	Persen (%)	90%	94%	96%	98%	100%	100%
1.3.1 Tefa memiliki Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa/Jobsheet (LKS)	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator	Nilai Satuan	Target					
		2024 Dasar	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2 Tefa memiliki bahan praktik untuk proses produksi atau pelayanan sesuai permintaan konsumen	Persen (%)	80%	85%	90%	97%	98%	100%
1.3.3 Pelaksanaan pendidikan dan latihan	Persen (%)	90%	94%	96%	98%	100%	100%
1.3.4 Terdapat kegiatan pengajar/instruktur sesuai tupoksi dan job order industri	Persen (%)	85%	87%	90%	97%	98%	100%
1.3.5 Pola pembelajaran/training berbasis corporate culture	Persen (%)	90%	94%	96%	98%	100%	100%
1.4.1 Tefa memiliki Marketing & Promotion Plan	Persen (%)	80%	85%	90%	97%	98%	100%
1.4.2 Tefa memiliki media komunikasi untuk menjangkau pasar	Persen (%)	85%	87%	90%	97%	98%	100%
1.4.3 Tefa memiliki brosur/leaflet/sarana lain (website, CD, dan lain-lain.)	Persen (%)	90%	94%	96%	98%	100%	100%
1.4.4 Tefa memiliki jangkauan pasar	Persen (%)	90%	94%	96%	98%	100%	100%
1.4.5 Terdapat penanggung jawab marketing Tefa	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1.5.1 Produk/jasa yang dihasilkan sesuai standar dan sesuai dengan kebutuhan internal	Persen (%)	79%	80%	81%	82%	90%	95%
1.5.2 Produk/jasa yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar	Persen (%)	80%	85%	90%	97%	98%	100%
1.5.3 Delivery produk/jasa tepat waktu	Persen (%)	90%	94%	96%	98%	100%	100%
1.5.4 Qualitas produk/jasa yang dihasilkan sesuai standar dan harga yang diberikan dapat bersaing dengan produk/jasa sejenis di pasaran	Persen (%)	80%	85%	90%	97%	98%	100%
1.5.5 Produk/jasa memiliki quality control yang sesuai standar	Persen (%)	85%	87%	90%	97%	98%	100%
6.1.1 Kompetensi SDM teaching factory sesuai standar tefa	Persen (%)	90%	94%	96%	98%	100%	100%

Indikator	Nilai Satuan	Target					
		2024 Dasar	2025	2026	2027	2028	2029
6.1.2 Jumlah dan kesesuain SDM untuk menjalankan tefa sudah memenuhi	Persen (%)	90%	94%	96%	98%	100%	100%
6.1.3 SDM tefa memiliki motivasi untuk menjalankan tefa	Persen (%)	85%	87%	90%	97%	98%	100%
6.1.4 SDM tefa memiliki kemampuan inovasi	Persen (%)	85%	87%	90%	97%	98%	100%
6.1.5 SDM tefa memiliki team work yang saling mendukung	Persen (%)	87%	88%	90%	97%	98%	100%
7.1.1 Memiliki bentuk kerja sama sesuai standar tefa	Persen (%)	85%	87%	90%	97%	98%	100%
7.1.2 Pelaksanaan tefa didasarkan pada project work	Persen (%)	90%	94%	96%	98%	100%	100%
7.1.3 Adanya transfer teknologi dari industri ke SMKN	Persen (%)	80%	85%	90%	97%	98%	100%

2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 2 Karimun

Tabel Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
BLUD SMK Negeri 2 Karimun

No	Unit Teaching Factory (TEFA)	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Keterangan
1	**TEFA Perhotelan**	Laundry	230.000	0	0%	Tidak ada pembelian barang
2	**TEFA Kuliner**	Produksi dan penjualan minuman	750.000	0	0%	Tidak ada pembelian barang
3	**TEFA Tata Busana**	Jasa vermak	140.000	0	0%	Tidak ada pembelian barang

No	Unit Teaching Factory (TEFA)	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Keterangan
4	**TEFA Tata Rias**	Jasa Make up dan hairstyling untuk event	230.000	0	0%	Tidak ada pembelian barang
5	**TEFA Usaha Layanan Wisata**	Produksi lampu LED hemat energi	50.000	0	0%	Tidak ada pembelian barang
6	**TEFA Bisnis Daring dan Pemasarn**	Retail	750.000	0	0%	Tidak ada pembelian barang
7	**TEFA Manajemn Perkantoran dan Layanan Bisnis**	Jasa Jilid, Print, fotocopy dan penjualan ATK	250.000	0	0%	Tidak ada pembelian barang

BAB III

INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja pada BLUD SMK, pada laporan keuangan ini digunakan sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat managemen yang digunakan untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran dan tujuan, untuk mewujudkan misi dan visi organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut akan disajikan data kinerja BLUD SMK Negeri 2 KarimunTahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target BLUD SMK Negeri 2 Karimun Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
A. Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa					
1	Persentase kelulusan siswa	100%	100%	100 %	Seluruh siswa lulus
2	Rata-rata nilai Ujian Kompetensi Keahlian (UKK)	≥ 85	80%	100 %	Mencapai target
3	Persentase siswa yang memperoleh sertifikasi kompetensi industri	100%	100%	100 %	Seluruh siswa lulus uji sertifikasi
4	Persentase lulusan yang bekerja sesuai kompetensi dalam 6 bulan	70%	60%	90%	Hampir mencapai target, perlu peningkatan kemitraan
5	Persentase lulusan yang berwirausaha	50%	10%	20%	Tidak tercapai target, program wirausaha belum berjalan baik
B. Kinerja Keuangan dan Unit Usaha BLUD					

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
6	Persentase pendapatan unit usaha BLUD terhadap biaya operasional sekolah	30%	10%	30%	Hampir mencapai target, strategi pemasaran perlu ditingkatkan
7	Efisiensi penggunaan dana BLUD sesuai rencana kerja	90%	45%	50%	Anggaran terserap dengan baik dan efektif
C. Kinerja Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)					
8	Jumlah kerja sama aktif dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	5 mitra	0 mitra	0%	Belum mencapai target kerja sama dengan perusahaan
9	Persentase siswa yang menjalani magang industri	100%	100%	100 %	Semua siswa telah menjalani magang
10	Jumlah produk atau jasa unggulan dari Teaching Factory (TEFA)	4 produk	2 produk	50%	Ada satu produk yang belum mencapai standar pasar
D. Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan					
11	Kepuasan siswa dan orang tua terhadap layanan pendidikan	85%	88%	103 %	Melebihi target berdasarkan survei internal
12	Jumlah guru produktif bersertifikasi industri	75%	70%	93%	Hampir mencapai target, ada guru dalam proses sertifikasi

Berdasarkan tabel pencapaian, secara keseluruhan SMK BLUD telah mencapai rata-rata 95% dari target yang ditetapkan. Beberapa indikator telah mencapai target, seperti p[resentasi kelulusan, persentase siswa memperoleh sertifikst kompetensi industri, persentase siswa yang menjalani magang industri. Namun, ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, seperti pencapaian kerjasama mitra dan pengembangan produk Teaching Factory. Untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memperkuat kemitraan dengan industri untuk meningkatkan jumlah lulusan yang bekerja sesuai kompetensi.
2. Optimalisasi pemasaran unit usaha BLUD untuk meningkatkan pendapatan sekolah.
3. Pengembangan produk Teaching Factory agar lebih kompetitif di pasar.

Dengan perbaikan strategi ini, diharapkan SMK BLUD dapat mencapai 100% target di tahun mendatang.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Adapun hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target realisasi antara lain :

b. Hambatan dalam berwirausaha bagi Siswa
   1. Kurangnya modal usaha
      - Tidak semua siswa memiliki kemampuan modal yang cukup untuk berwirausaha.
      - Kurangnya kepercayaan diri
      - Opersaingan yang ketat.
   2. Penyerapan lulusan ke dunia kerja belum optimal
      - Persaingan ketat di dunia kerja sehingga tidak semua lulusan langsung terserap.
      - Kurangnya pengalaman praktis yang relevan dengan kebutuhan industri.
      - Masih ada lulusan yang lebih memilih bekerja di luar bidang keahlian mereka.

b. Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan dan Unit Usaha BLUD
   1. Pendapatan unit usaha BLUD belum mencapai target
      - Persaingan dengan produk atau jasa dari industri komersial yang lebih mapan.
      - Kurangnya strategi pemasaran dan branding produk/jasa SMK BLUD.
      - Keterbatasan modal untuk meningkatkan skala produksi dan inovasi produk.
   2. Efisiensi penggunaan dana BLUD
      - Masih ada beberapa program yang belum berjalan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas.

c. Hambatan dalam Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)
   1. Jumlah produk unggulan Teaching Factory belum optimal
      - Keterbatasan bahan baku atau alat produksi yang menyebabkan terhambatnya pengembangan produk baru.
      - Produk belum sepenuhnya sesuai standar pasar, sehingga masih butuh perbaikan dalam kualitas dan pemasaran.
   2. Kemitraan industri masih perlu diperluas
      - Tidak semua industri bersedia menerima siswa magang karena keterbatasan kapasitas mereka.
      - Kurangnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja.

d. Hambatan dalam Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan
   1. Tingkat kepuasan siswa dan orang tua belum maksimal
      - Beberapa siswa merasa materi pembelajaran masih kurang relevan dengan dunia kerja.

- Orang tua belum sepenuhnya memahami konsep BLUD di SMK, sehingga kurang mendukung program sekolah.

2. Kurangnya jumlah guru bersertifikasi industri
   - Tidak semua guru memiliki kesempatan mengikuti pelatihan atau sertifikasi karena keterbatasan waktu dan biaya.
   - Masih ada kendala administratif dalam proses pengajuan sertifikasi guru ke lembaga industri terkait.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Akuntansi adalah BLUD SMK Negeri 2 Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas;
b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Karimun Provinsi Kepulauan Riau adalah:

a) ***Basis Kas*** untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam ***Laporan Realisasi Anggaran***

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat Kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

b) ***Basis akrual*** untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam ***Neraca***

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

c) ***Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran*** berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riautidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

d) ***Basis akrual untuk neraca*** berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas;

4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengakuan dan pengukuran atas transaksi kejadian ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan ini adalah:

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.
   Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD , adalah sebagai berikut:
   a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
   b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
   c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
   d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.
2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
   Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Karimun tahun 2025, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat Diterima pada Rekening Kas Umum. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum untuk seluruh transaksi setelah dilakukan pengesahan definitif bendahara. Dalam hal

badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

4.7 Kebijakan Akuntansi Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas secara umum diakui jika memenuhi kriteria:

a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.

4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari:

- Barang Konsumsi;
- Bahan untuk pemeliharaan;
- Suku cadang;
- Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
- Bahan baku;
- Barang dalam proses/setengah jadi;

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal; diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.

4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.

4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

BAB V

RINCIAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang telah disusun BLUD SMK Negeri 2 Karimun periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini:

5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan – LRA

Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 2 Karimun mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp 1.131.840.138,00 atau sebesar 91,82% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.232.660.000,00 sebagaimana ikhtisar sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN**	**1.232.660.000,00**	**1.131.840.138,00**	**91,82**	**0,00**
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	2.500.000,00	1.660.800,00	66,43	0,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00	#NUM!	0,00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	0,00
6	Pendapatan Hibah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan APBN/APBD	1.118.960.000,00	1.118.960.000,00	100,00	0,00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	0,00	19.338,00	0,00	0,00
	Jumlah PENDAPATAN	**1.232.660.000,00**	**1.131.840.138,00**	**91,82**	**0,00**

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Tahun 2025 sebesar Rp1,680,800,00 atau 67,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 2.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN**	2.500.000,00	1.660.800,00	66,43	**0,00**
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	2.500.000,00	1.660.800,00	66,43	0,00

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah Tahun 2025 sebesar Rp100.000.000,00 atau 00,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp100,000,000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Hibah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah PENDAPATAN HIBAH	100.000.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Tahun 2025 sebesar Rp11,200.000 atau 100% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp11,200,000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Hasil Kerja Sama	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	0,00
	Jumlah PENDAPATAN HASIL KERJA SAMA	**11.200.000,00**	**11.200.000,00**	**100,00**	**0,00**

iv) Pendapatan BLUD dari APBD/APBN

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD/APBN Tahun 2025 sebesar Rpxxxx,00 atau xx,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rpxxx,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan APBN/APBD	1.118.960.000,00	1.118.960.000,00	100,00	0,00
	Jumlah PENDAPATAN APBN/APBD	**1.118.960.000,00**	**1.118.960.000,00**	**100,00**	**0,00**

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp 19.338,00 atau 00,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
1	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	0,00	19.338,00	0,00	0,00

b. Belanja

1. Belanja Pegawai BLUD

Berupa Belanja Gaji & Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan BLUD dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00 % dari total anggaran belanja pegawai BLUD yang sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Pegawai BLUD	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp 727.842.100,00 atau 85,76% dari total anggaran belanja barang dan jasa yang sebesar Rp. 848.699.000,00 dengan rincian sebagai berikut :.

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
9	**BELANJA**				
10	**BELANJA OPERASI**	**848.699.000,00**	**727.842.100,00**	**85,76**	**0,00**
11	Belanja Pegawai	0,00	0,00	#NUM!	0,00
12	Belanja Barang dan Jasa	324.397.982,00	297.029.482,00	91.56	0,00
13	Bunga	0,00	0,00	#NUM!	0,00
14	Belanja Lain-lain	0,00	0,00	#NUM!	0,00
	Belanja jasa	297.926.400,00	252.402.400,00	84,72	0,00

3. Belanja Modal BLUD

Belanja modal BLUD terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp 231.585.000,00 atau 100% dari total anggaran belanja modal peralatan dan mesin yang sebesar Rp 231.585.000,00 belanja modal gedung dan bangunan yang terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total anggaran belanja modal gedung dan bangunan yang sebesar Rp0,00 Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp 151.971.000,00 , atau 100% dari total anggaran belanja Aset Tetap Lainnya Sebesar Rp 151.971.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
15	**BELANJA MODAL**	**383.961.000,00**	**383.556.000,00**	**99,89**	**0,00**
16	Belanja Tanah	0,00	0,00	#NUM!	0,00
17	Belanja Peralatan dan Mesin	231.585.000,00	231.585.000,00	100,00	0,00
18	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	#NUM!	0,00

19	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	#NUM!	0,00
20	Belanja Aset Tetap Lainnya	152.376.000,00	151.971.000,00	99,73	0,00
21	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	#NUM!	0,00
	Jumlah BELANJA	**1.232.660.000,00**	**1.111.398.100,00**	**90,16**	**0,00**

5.2 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo awal SAL pada tahun 2025 sebesar Rp0,00 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

2) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan digunakan dalam rangka membiayai defisit tahun anggaran berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

3) Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SiLPA tahun 2025 sebesar Rp 20.442.038,00

5.3 Neraca

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- Berupa kas/setara kas dan persediaan

Aset Lancar sebesar Rp 20.442.038,00 yang dimiliki BLUD SMK Negeri 2 Karimun per 31 Desember 2025 terdiri dari:

a. Kas di Bendahara BLUD

Kas BLUD adalah semua bentuk penerimaan dan pengeluaran uang tunai atau setara kas yang dikelola oleh SMK Negeri 2 Karimun dalam rangka menjalankan operasionalnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, dan pendapatan lainnya. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp. 20.442.038,00 dengan rincian :

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
	Kas di BLUD		**20.442.038,00**	**0,00**
	Kas di BLUD		**20.442.038,00**	**0,00**
	Kas di BLUD		20.442.038,00	0,00

b. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan kas dibawah pengelolaan bendahara BOS yang bersumber dari pemerintah untuk mendukung operasional sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan tanpa membebani peserta didik. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BOS sebesar RP 0,00 dengan rincian :

Uraian	Jumlah
Kas di Bank	00
Rek Bank xxxx	00
Rek Bank xyx	00
Kas Tunai	00
Total Kas di Bendahara BOS	00

c. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 terdiri dari :

2. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh pelayanan umum. Aset tetap sebesar Rp 2.656.507.840,84 per 31 Desember 2025 merupakan nilai perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan yang pengadaannya bersumber dari pengelolaan dana BOS dan dana SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dan BLUD.

19	**ASET TETAP**	**1.1.2.**	**2.656.507.840,84**	**0,00**
20	Tanah	1.1.2.01.	0,00	0,00
21	Peralatan dan Mesin	1.1.2.02.	1.734.831.062,00	0,00
22	Gedung dan Bangunan	1.1.2.03.	0,00	0,00
23	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.1.2.04.	129.500.000,00	0,00
24	Aset Tetap Lainnya	1.1.2.05.	1.021.897.200,00	0,00
25	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.1.2.06.	0,00	0,00
26	Akumulasi Penyusutan	1.1.2.07.	(229.720.421,16)	0,00

3. Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 2 Karimun tidak memiliki kewajiban. (sesuaikan angka pada laporan neraca)

4. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD SMK Negeri 2 Karimun pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pada Tahun 2025 Ekuitas adalah sebesar Rp 2.676.949.878,84

5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional
b) Beban dari kegiatan operasional
c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
d) Pos luar biasa
e) Surplus/defisit LO

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional

Pendapatan LO dari kegiatan operasional terdiri dari :

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2025 sebesar Rp 1.660.800,00 lebih tinggi/rendah dari Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	**1.660.800,00**	**0,00**	**1.660.800,00**	**100,00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	1.660.800,00	0,00	1.660.800,00	100,00

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2025 sebesar Rp. 68.306.431,00 lebih tinggi/rendah dari pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2024 sebesar Rp.0 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan BLUD dari Hibah-LO	**68.306.431,00**	**0,00**	**68.306.431,00**	**100,00**
	Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat-LO	68.306.431,00	0,00	68.306.431,00	100,00

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO Tahun 2025 sebesar Rp12.200.000,00 lebih tinggi/rendah dari pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	**11.200.000,00**	**0,00**	**11.200.000,00**	**100,00**
	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	100,00

iv) Pendapatan BLUD dari APBD/APBN LO

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD LO Tahun 2025 sebesar Rp 1.118.960.000,00 lebih tinggi/rendah dari pendapatan BLUD dari APBD LO sebesar Rp 1.118.960.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	DAK Non Fisik	**1.118.960.000,00**	**0,00**	**1.118.960.000,00**	**100,00**
	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	1.118.960.000,00	0,00	1.118.960.000,00	100,00
	Jumlah DAK Non Fisik	**1.118.960.000,00**	**0,00**	**1.118.960.000,00**	**100,00**

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2025 sebesar Rp19.338,00 lebih tinggi/rendah dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	**19.338,00**	**0,00**	**19.338,00**	**100,00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro-LO	19.338,00	0,00	19.338,00	100,00

b) Beban dari kegiatan operasional

1. Belanja Pegawai BLUD LO

Berupa Beban Gaji & Tunjangan dan Beban Tambahan Penghasilan BLUD LO dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp0,00 lebih tinggi/rendah dari beban pegawai BLUD LO tahun 2024 yang sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Beban barang dan jasa LO tahun 2025 terealisasi sebesar Rp796.148.531,00 lebih tinggi/rendah dari dari Beban barang dan jasa LO tahun 2024 yang sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :.

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Beban Barang dan Jasa	**796.148.531,00**	**0,00**	**796.148.531,00**	**100,00**
	Beban Barang	**318.222.482,00**	**0,00**	**318.222.482,00**	**100,00**
	Beban Barang Pakai Habis	303.476.432,00	0,00	303.476.432,00	100,00
	Beban Barang Tak Habis Pakai	14.746.050,00	0,00	14.746.050,00	100,00
	Beban Jasa	**277.052.400,00**	**0,00**	**277.052.400,00**	**100,00**
	Beban Jasa Kantor	216.186.400,00	0,00	216.186.400,00	100,00
	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	16.770.000,00	0,00	16.770.000,00	100,00
	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	44.096.000,00	0,00	44.096.000,00	100,00
	Beban Pemeliharaan	**27.068.200,00**	**0,00**	**27.068.200,00**	**100,00**
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.728.200,00	0,00	15.728.200,00	100,00
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas	**173.805.449,00**	**0,00**	**173.805.449,00**	**100,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	173.805.449,00	0,00	173.805.449,00	100,00
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	**229.720.421,16**	**0,00**	**229.720.421,16**	**100,00**
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	**229.720.421,16**	**0,00**	**229.720.421,16**	**100,00**
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	229.720.421,16	0,00	229.720.421,16	100,00

c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan dikelompokkan dalam kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional BLUD SMK Negeri 2 Karimun tahun 2025 sebesar Rp0,00.

d) Surplus/defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan beban. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 2 Karimun mencatat surplus/Defisit LO sebesar Rp 174.277.616,84

5.5 Laporan Arus Kas

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi BLUD SMK Negeri 2 Karimun dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi BLUD SMK Negeri 2 Karimun pada Tahun 2025 sebesar Rp. 1.131.840.138,00 yang terdiri dari:

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	**Arus Masuk Kas**		
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	1.660.800,00	0,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	11.200.000,00	0,00
6	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
7	Pendapatan APBN/APBD	1.118.960.000,00	0,00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	19.338,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	1.131.840.138,00	0,00

b. Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi BLUD SMK Negeri 2 Karimun selama Tahun 2025 sebesar Rp. 9.756.000 terdiri dari:

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
9	**Arus Keluar Kas**		
10	Pembayaran Pegawai	0,00	0,00
11	Pembayaran Barang dan Jasa	399.283.482,00	0,00
12	Pembayaran Pemeliharaan	27.068.200,00	0,00
13	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	150.148.400,00	0,00
14	Pembayaran Perjalanan Dinas	151.342.018,00	0,00
15	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	727.842.100,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi	403.998.038,00	0,00

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp 403.998.038,00 Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
	Jumlah Arus Masuk Kas	1.131.840.138,00	0,00
9	**Arus Keluar Kas**		
	Jumlah Arus Keluar Kas	727.842.100,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi	403.998.038,00	0,00

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset Non-Keuangan lainnya.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan di masa yang akan datang.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 2 Karimun pada Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 yang terdiri dari:

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
16	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
17	**Arus Masuk Kas**		
18	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
19	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
20	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
21	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
22	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
23	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
24	Penerimaan dari Divestasi	0,00	0,00
25	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 2 Karimun pada Tahun 2025 sebesar Rp 383.556.000,00 yang terdiri dari:

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
26	**Arus Keluar Kas**		
27	Perolehan Tanah	0,00	0,00
28	Perolehan Peralatan dan Mesin	231.585.000,00	0,00
29	Perolehan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
30	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
31	Perolehan Aset Tetap Lainnya	151.971.000,00	0,00
32	Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
33	Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00
34	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	383.556.000,00	0,00

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rpxx,00 Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
16	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	383.556.000,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(383.556.000,00)	0,00

3) Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Periode 2025

Kenaikan/(penurunan) Kas Bersih Selama Periode Tahun 2025 merupakan akumulasi jumlah kenaikan/(penurunan) kas bersih dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris.

Selama Tahun Anggaran 2025 terjadi kenaikan/penurunan kas bersih sebesar Rp20.562.038,00 yang terdiri dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp 403.998.038,00 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp(383.556.000,00) Perbandingan Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	20.562.038,00	

4) Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025

Saldo akhir kas per 31 Desember 2025 merupakan perhitungan Saldo Awal per 1 Januari 2025 ditambah (dikurangi) dengan kenaikan/ (penurunan) kas bersih selama periode tahun 2025.

Saldo akhir kas di BLUD SMK Negeri 2 Karimun per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 20.442.038,00 didapat dari perhitungan saldo awal Tahun 2025 sebesar Rp.0,00 ditambah kenaikan/penurunan kas bersih selama periode tahun 2025 sebesar Rp Rp0,00.

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
5	Kas di BLUD	1.1.1.02.	20.442.038,00	0,00

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

a) Ekuitas awal
b) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti:

1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d) Ekuitas Akhir

a) Ekuitas Awal

Pada Tahun 2025 BLUD SMK Negeri 2 Karimun mencatat ekuitas awal sebesar Rp0,00 yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada laporan Tahun 2025. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jumlah Aset Tahun 2025 Rp 2.677.069.878,84
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025 Rp 120.000,00
- **Saldo Awal Ekuitas 2025 Rp 2.677.069.878,84**

b) Surplus/Defisit LO

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dalam Laporan Operasional Tahun 2025 tercatat sebesar Rp 174.277.616,84.

c) Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar Rpxx,00 merupakan saldo kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Total Aset dan Total Kewajiban BLUD SMK Negeri 2 Karimun Tahun 2025.

- Jumlah Aset Tahun 2025 Rp 2.677.069.878,84
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025 Rp 120.000,00
- **Saldo Awal Ekuitas 2025 Rp 2.677.069.878,84**

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

BLUD SMK Negeri 2 Karimun dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 1407 Tahun 2024.

BLUD SMK Negeri 2 Karimun beralamat di Jalan Paya Cincin Sei. Bati, Kel. Pamak, Kec. Tebing, kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

BLUD SMK Negeri 2 Karimun adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nirlaba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di , dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra BLUD SMK Negeri 2 Karimun , sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala BLUD SMK Negeri 2 Karimun

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun sebagai bentuk tanggung jawab BLUD SMK Negeri 2 Karimun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, penyusunan laporan keuangan BLUD juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Secara umum pencapaian kinerja atas sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik, namun begitu masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang masih harus terus dibenahi dan menjadi perhatian oleh BLUD SMK Negeri 2 Karimun

Dengan memperhatikan strategisnya peran sekolah dan besarnya tantangan yang dihadapi untuk mendukung Visi Misi Pendidikan Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, SMK Negeri 2 Karimun Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja serta memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan industri. Melalui pendekatan berbasis kompetensi, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta pengelolaan keuangan yang transparan melalui sistem BLUD, sekolah ini berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan lulusan SMK dapat menjadi tenaga kerja yang unggul dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Akhir kata, BLUD SMK Negeri 2 Karimun Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan dalam penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban kami dalam menyajikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

Karimun, 25 Mei 2026
PIMPINAN BLUD
SMK NEGERI 2 KARIMUN
PROVINSI KEPULUAN RIAU

PAIZAH, S.Ag
Penata Tingkat I/III(d)
NIP. 197106162007012016

LAPORAN KEUANGAN BLUD

SMK NEGERI KUNDUR

TAHUN 2025

AUDITED



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS PENDIDIKAN

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
KATA PENGANTAR v
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWAB vii
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN viii
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH x
C. NERACA xi
D. LAPORAN OPERASIONAL xiv
E. LAPORAN ARUS KAS xvi
F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS xx
G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri Kundur
1.4 Periode Pelaporan Keuangan
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Profil BLUD SMK Negeri Kundur
1.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri Kundur
1.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri Kundur
1.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri Kundur tahun 2025

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025
3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Bab IV Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2 Asumsi dasar Laporan Keuangan
4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan
4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja
4.7 Kebijakan Akuntansi Kas
4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan
4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
5.1 Laporan Realisasi Anggaran
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3 Neraca
5.4 Laporan Operasional
5.5 Laporan Arus Kas
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
5.7 Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan atas informasi – Informasi non Keuangan
6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

Bab VII Penutup

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan BLUD SMK Negeri Kundur... 5
Tabel. 2 Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target BLUD SMK Negeri Kundur Tahun 2025 7
Tabel. 3 Pendapatan LRA 14
Tabel. 4 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 14
Tabel. 5 Pendapatan BLUD dari Hibah 15
Tabel. 6 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain 15
Tabel. 7 Pendapatan BLUD dari APBD 15
Tabel. 8 Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah 15
Tabel. 9 Belanja Pegawai BLUD 16
Tabel. 10 Belanja Barang dan Jasa BLUD 16
Tabel. 11 Belanja Modal BLUD 17
Tabel. 12 Kas di Bendahara BLUD 17
Tabel. 13 Kas di Bendahara BOS 17
Tabel. 14 Persediaan 18
Tabel. 15 Peralatan dan Mesin 18
Tabel. 16 Gedung dan Bangunan 19
Tabel. 17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 19
Tabel. 18 Aset Tetap Lainnya 20
Tabel. 19 Aset Lainnya 20
Tabel. 20 Ekuitas 21
Tabel. 21 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO 21
Tabel. 22 Pendapatan BLUD dari Hibah LO 21
Tabel. 23 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO 21
Tabel. 24 Pendapatan BLUD dari APBD LO 22
Tabel. 25 Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah LO 22
Tabel. 26 Belanja Pegawai BLUD LO 22
Tabel. 27 Belanja Barang dan Jasa BLUD 23
Tabel. 28 Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi 23
Tabel. 29 Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi 24
Tabel. 29.1 Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi 24
Tabel. 30 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi 24
Tabel. 31 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi 25
Tabel. 31.1 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi 25
Tabel. 32 Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Priode 2025 26
Tabel. 32.1 Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Priode 2025 26

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. BLUD SMK Negeri Kundur adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri Kundur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kami berharap dengan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) di Provinsi Kepulauan Riau.

Karimun, 25 Mei 2026

Pimpinan BLUD SMKN Kundur
Provinsi Kepulauan Riau

Junaidah S, S.Pd., M.Pd
Penata Tingkat I (III/d)
NIP197611112003122008

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan SMK N Kundur Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (iii) Neraca; (iv) Laporan Operasional (LO); (v) Laporan Arus Kas (LAK); (vi) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (vii) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Karimun, 25 Mei 2026

Pimpinan BLUD SMKN Kundur
Provinsi Kepulauan Riau



Junaidah S, S.Pd., M.Pd
Penata Tingkat I (III/d)
NIP197611112003122008

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SMKN KUNDUR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN**	**628.380.000,00**	**523.785.795,00**	**83,35**	**0,00**
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	20.000.000,00	15.824.800,00	79,12	0,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	8.000.000,00	7.523.500,00	94,04	0,00
6	Pendapatan Hibah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan APBN/APBD	500.380.000,00	500.380.000,00	100,00	0,00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	0,00	57.495,00	0,00	0,00
	Jumlah PENDAPATAN	**628.380.000,00**	**523.785.795,00**	**83,35**	**0,00**
9	**BELANJA**				
10	**BELANJA OPERASI**	**487.405.400,00**	**379.883.500,00**	**77,94**	**0,00**
11	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Barang dan Jasa	487.405.400,00	379.883.500,00	77,94	0,00
13	Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**BELANJA MODAL**	**140.974.600,00**	**140.974.600,00**	**100,00**	**0,00**
16	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Peralatan dan Mesin	90.439.600,00	90.439.600,00	100,00	0,00
18	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Aset Tetap Lainnya	50.535.000,00	50.535.000,00	100,00	0,00
21	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah BELANJA	**628.380.000,00**	**520.858.100,00**	**82,89**	**0,00**
	Surplus/ Defisit Sebelum Pembiayaan	**0,00**	**2.927.695,00**	**0,00**	**0,00**
22	**PENERIMAAN**				
23	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**0,00**	**6.103.728,00**	**0,00**	**0,00**
24	Penggunaan SILPA	0,00	6.103.728,00	0,00	0,00
25	Penerimaan dari Divestasi	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	0,00

	Jumlah PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**0,00**	**6.103.728,00**	**0,00**	**0,00**
27	**PENGELUARAN**				
28	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembiayaan Neto	**0,00**	**6.103.728,00**	**0,00**	**0,00**
	Surplus/ Defisit	**0,00**	**9.031.423,00**	**0,00**	**0,00**

Karimun, 25 Mei 2026

Pimpinan BLUD SMKN Kundur
Provinsi Kepulauan Riau

Junaidah S, S.Pd., M.Pd
Penata Tingkat I (III/d)
NIP197611112003122008

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SMKN KUNDUR

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	**7.5.2.1**	0,00	0,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**7.5.2.2**	0,00	0,00
3	Subtotal (1-2)		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	**7.5.2.3**	2.927.695,00	0,00
5	Subtotal (3+4)		2.927.695,00	0,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		6.103.728,00	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	**7.5.2.6**	9.031.423,00	0,00

Karimun, 25 Mei 2026

Pimpinan BLUD SMKN Kundur
Provinsi Kepulauan Riau

Junaidah S, S.Pd., M.Pd
Penata Tingkat I (III/d)
NIP197611112003122008

III. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SMKN KUNDUR

NERACA (BLUD)

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
	ASET		**3.504.113.292,40**	**0,00**
	ASET LANCAR		**9.031.423,00**	**0,00**
	Kas dan Setara Kas		**9.031.423,00**	**0,00**
	Kas di BLUD		**8.601.561,00**	**0,00**
	Kas di BLUD		**8.601.561,00**	**0,00**
	Kas di BLUD		8.601.561,00	0,00
	Kas Lainnya		**26.134,00**	**0,00**
	Kas Lainnya		**26.134,00**	**0,00**
	Kas Lainnya		26.134,00	0,00
	Kas Dana BOSP		**403.728,00**	**0,00**
	Kas Dana BOSP		**403.728,00**	**0,00**
	Kas Dana BOSP		403.728,00	0,00
	Persediaan		**0,00**	**0,00**
	Barang Pakai Habis		**0,00**	**0,00**
	Bahan		**0,00**	**0,00**
	Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi		0,00	0,00
	Persediaan Bahan Kimia		0,00	0,00
	Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas		0,00	0,00
	Persediaan Bahan Baku		0,00	0,00
	Persediaan Bahan Makanan Pokok		0,00	0,00
	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman		0,00	0,00
	Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran		0,00	0,00
	Persediaan Isi Tabung Gas		0,00	0,00
	Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan		0,00	0,00
	Persediaan Bahan Lainnya		0,00	0,00
	Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran		0,00	0,00
	Suku Cadang		**0,00**	**0,00**
	Suku Cadang Alat Kedokteran		0,00	0,00
	Suku Cadang Alat Bengkel		0,00	0,00
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		**0,00**	**0,00**
	Persediaan Alat Tulis Kantor		0,00	0,00

	Persediaan Kertas dan Cover		0,00	0,00
	Persediaan Bahan Cetak		0,00	0,00
	Persediaan Benda Pos		0,00	0,00
	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender		0,00	0,00
	Persediaan Bahan Komputer		0,00	0,00
	Persediaan Perabot Kantor		0,00	0,00
	Persediaan Alat Listrik		0,00	0,00
	Persediaan Perlengkapan Dinas		0,00	0,00
	Perlengkapan Pendukung Olahraga		0,00	0,00
	Suvenir/Cendera Mata		0,00	0,00
	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainny		0,00	0,00
	Obat-obatan		**0,00**	**0,00**
	Persediaan Obat		0,00	0,00
	Persediaan Obat-obatan Lainnya		0,00	0,00
	Natura dan Pakan		**0,00**	**0,00**
	Natura		0,00	0,00
	Pakan		0,00	0,00
	Natura dan Pakan Lainnya		0,00	0,00
	Jumlah ASET LANCAR		**9.031.423,00**	**0,00**
	ASET TETAP		**3.492.665.869,40**	**0,00**
	Tanah		**176.000.000,00**	**0,00**
	Tanah		**176.000.000,00**	**0,00**
	Tanah Persil		**176.000.000,00**	**0,00**
	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja		176.000.000,00	0,00
	Peralatan dan Mesin		**1.011.134.101,00**	**0,00**
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		**947.925.601,00**	**0,00**
	Alat Kantor		**926.926.101,00**	**0,00**
	Alat Kantor Lainnya		926.926.101,00	0,00
	Alat Rumah Tangga		**20.999.500,00**	**0,00**
	Alat Pendingin		15.000.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		5.999.500,00	0,00
	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		**15.208.000,00**	**0,00**
	Alat Studio		**11.108.000,00**	**0,00**
	Peralatan Studio Audio		11.108.000,00	0,00
	Alat Komunikasi		**4.100.000,00**	**0,00**
	Alat Komunikasi Telephone		4.100.000,00	0,00
	Komputer		**48.000.500,00**	**0,00**
	Komputer Unit		**29.060.000,00**	**0,00**
	Personal Computer		29.060.000,00	0,00
	Peralatan Komputer		**18.940.500,00**	**0,00**
	Peralatan Jaringan		1.050.500,00	0,00
	Peralatan Komputer Lainnya		17.890.000,00	0,00
	Gedung dan Bangunan		**1.779.916.500,00**	**0,00**
	Bangunan Gedung		**1.779.916.500,00**	**0,00**
	Bangunan Gedung Tempat Kerja		**1.779.916.500,00**	**0,00**
	Bangunan Gedung Kantor		1.779.916.500,00	0,00
	Jalan, Jaringan, dan Irigasi		**13.311.200,00**	**0,00**

	Jalan dan Jembatan		**13.311.200,00**	**0,00**
	Jalan		**13.311.200,00**	**0,00**
	Jalan Nasional		13.311.200,00	0,00
	Aset Tetap Lainnya		**682.130.700,00**	**0,00**
	Bahan Perpustakaan		**682.130.700,00**	**0,00**
	Bahan Perpustakaan Tercetak		**682.130.700,00**	**0,00**
	Buku Umum		631.595.700,00	0,00
	Buku Agama		9.510.000,00	0,00
	Buku Ilmu Bahasa		3.870.000,00	0,00
	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam		2.520.000,00	0,00
	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis		34.635.000,00	0,00
	Akumulasi Penyusutan		**(169.826.631,60)**	**0,00**
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		**(169.826.631,60)**	**0,00**
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung		**(169.826.631,60)**	**0,00**
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan		(169.826.631,60)	0,00
	Jumlah ASET TETAP		**3.492.665.869,40**	**0,00**
	ASET LAINNYA		**2.416.000,00**	**0,00**
	Aset Lain-lain		**2.416.000,00**	**0,00**
	Aset Lain-lain		**2.416.000,00**	**0,00**
	Aset Lain-lain		**2.416.000,00**	**0,00**
	Aset Rusak Berat/Usang		2.416.000,00	0,00
	Jumlah ASET LAINNYA		**2.416.000,00**	**0,00**
	JUMLAH ASET		**3.504.113.292,40**	**0,00**
	EKUITAS		**3.504.113.292,40**	**0,00**
	EKUITAS		**3.504.113.292,40**	**0,00**
	Ekuitas		**3.504.113.292,40**	**0,00**
	Ekuitas		**3.504.113.292,40**	**0,00**
	Ekuitas		**3.504.113.292,40**	**0,00**
	Ekuitas		3.504.113.292,40	0,00
	Jumlah EKUITAS		**3.504.113.292,40**	**0,00**
	JUMLAH EKUITAS		**3.504.113.292,40**	**0,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**3.504.113.292,40**	**0,00**

Karimun, 25 Mei 2026

Pimpinan BLUD SMKN Kundur
Provinsi Kepulauan Riau

Junaidah S, S.Pd., M.Pd
Penata Tingkat I (III/d)
NIP197611112003122008

IV. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SMKN KUNDUR

LAPORAN OPERASIONAL (BLUD)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN - LO	**623.785.795,00**	**0,00**	**623.785.795,00**	**100,00**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**123.405.795,00**	**0,00**	**123.405.795,00**	**100,00**
	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	**123.405.795,00**	**0,00**	**123.405.795,00**	**100,00**
	Jasa Giro-LO	**26.134,00**	**0,00**	**26.134,00**	**100,00**
	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	**26.134,00**	**0,00**	**26.134,00**	**100,00**
	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	26.134,00	0,00	26.134,00	100,00
	Pendapatan dari BLUD-LO	**123.379.661,00**	**0,00**	**123.379.661,00**	**100,00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	**15.824.800,00**	**0,00**	**15.824.800,00**	**100,00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	15.824.800,00	0,00	15.824.800,00	100,00
	Pendapatan BLUD dari Hibah-LO	**100.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**100,00**
	Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat-LO	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00
	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	**7.523.500,00**	**0,00**	**7.523.500,00**	**100,00**
	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	7.523.500,00	0,00	7.523.500,00	100,00
	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	**31.361,00**	**0,00**	**31.361,00**	**100,00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro-LO	31.361,00	0,00	31.361,00	100,00
	Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**123.405.795,00**	**0,00**	**123.405.795,00**	**100,00**
	DAK Non Fisik	**500.380.000,00**	**0,00**	**500.380.000,00**	**100,00**
	DAK Non Fisik	**500.380.000,00**	**0,00**	**500.380.000,00**	**100,00**
	DAK Non Fisik	**500.380.000,00**	**0,00**	**500.380.000,00**	**100,00**
	DAK Non Fisik	**500.380.000,00**	**0,00**	**500.380.000,00**	**100,00**
	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	500.380.000,00	0,00	500.380.000,00	100,00
	Jumlah DAK Non Fisik	**500.380.000,00**	**0,00**	**500.380.000,00**	**100,00**
	JUMLAH PENDAPATAN - LO	**623.785.795,00**	**0,00**	**623.785.795,00**	**100,00**
	BEBAN DAERAH	**662.891.731,60**	**0,00**	**662.891.731,60**	**100,00**
	BEBAN OPERASI	**662.891.731,60**	**0,00**	**662.891.731,60**	**100,00**
	Beban Barang dan Jasa	**493.065.100,00**	**0,00**	**493.065.100,00**	**100,00**
	Beban Barang	**211.775.612,00**	**0,00**	**211.775.612,00**	**100,00**
	Beban Barang Pakai Habis	**197.084.012,00**	**0,00**	**197.084.012,00**	**100,00**

	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	66.806.840,00	0,00	66.806.840,00	100,00
	Beban Bahan-Bahan Kimia	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	100,00
	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	100,00
	Beban Bahan-Bahan Baku	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00	100,00
	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	535.042,00	0,00	535.042,00	100,00
	Beban Bahan-Bahan Lainnya	2.392.000,00	0,00	2.392.000,00	100,00
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	1.299.000,00	0,00	1.299.000,00	100,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.042.249,00	0,00	11.042.249,00	100,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.486.760,00	0,00	6.486.760,00	100,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.823.000,00	0,00	14.823.000,00	100,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	14.114.000,00	0,00	14.114.000,00	100,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	810.000,00	0,00	810.000,00	100,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	25.874.800,00	0,00	25.874.800,00	100,00
	Beban Obat-Obatan-Obat	603.821,00	0,00	603.821,00	100,00
	Beban Natura dan Pakan-Natura	10.272.500,00	0,00	10.272.500,00	100,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	35.230.000,00	0,00	35.230.000,00	100,00
	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	100,00
	Beban Barang Tak Habis Pakai	**1.510.000,00**	**0,00**	**1.510.000,00**	**100,00**
	Beban Komponen-Komponen Peralatan	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	100,00
	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	**13.181.600,00**	**0,00**	**13.181.600,00**	**100,00**
	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	13.181.600,00	0,00	13.181.600,00	100,00
	Beban Jasa	**86.903.238,00**	**0,00**	**86.903.238,00**	**100,00**
	Beban Jasa Kantor	**86.903.238,00**	**0,00**	**86.903.238,00**	**100,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21.550.000,00	0,00	21.550.000,00	100,00
	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	19.125.000,00	0,00	19.125.000,00	100,00
	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	301.600,00	0,00	301.600,00	100,00
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
	Beban Tagihan Telepon	1.448.692,00	0,00	1.448.692,00	100,00
	Beban Tagihan Listrik	20.602.946,00	0,00	20.602.946,00	100,00
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	20.075.000,00	0,00	20.075.000,00	100,00
	Beban Pemeliharaan	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas	**193.386.250,00**	**0,00**	**193.386.250,00**	**100,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	**193.386.250,00**	**0,00**	**193.386.250,00**	**100,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	180.800.450,00	0,00	180.800.450,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.585.800,00	0,00	12.585.800,00	100,00
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	**169.826.631,60**	**0,00**	**169.826.631,60**	**100,00**
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	**169.826.631,60**	**0,00**	**169.826.631,60**	**100,00**
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	**169.826.631,60**	**0,00**	**169.826.631,60**	**100,00**
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	169.826.631,60	0,00	169.826.631,60	100,00

	Jumlah BEBAN OPERASI	**662.891.731,60**	**0,00**	**662.891.731,60**	**100,00**
	JUMLAH BEBAN DAERAH	**662.891.731,60**	**0,00**	**662.891.731,60**	**100,00**
	SURPLUS/ DEFISIT	**(39.105.936,60)**	**0,00**	**(39.105.936,60)**	**100,00**

Karimun, 25 Mei 2026

Pimpinan BLUD SMKN Kundur
Provinsi Kepulauan Riau



Junaidah.S, S.Pd., M.Pd
Penata Tingkat I (III/d)
NIP197611112003122008

V. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SMKN KUNDUR

LAPORAN ARUS KAS (BLUD)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	**Arus Masuk Kas**		
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	15.824.800,00	0,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	7.523.500,00	0,00
6	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
7	Pendapatan APBN/APBD	500.380.000,00	0,00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	57.495,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	523.785.795,00	0,00
9	**Arus Keluar Kas**		
10	Pembayaran Pegawai	0,00	0,00
11	Pembayaran Barang dan Jasa	179.033.312,00	0,00
12	Pembayaran Pemeliharaan	1.000.000,00	0,00
13	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	44.526.638,00	0,00
14	Pembayaran Perjalanan Dinas	155.323.550,00	0,00
15	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	379.883.500,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi	143.902.295,00	0,00
16	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
17	**Arus Masuk Kas**		
18	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
19	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
20	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
21	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
22	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
23	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
24	Penerimaan dari Divestasi	0,00	0,00
25	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
26	**Arus Keluar Kas**		
27	Perolehan Tanah	0,00	0,00

28	Perolehan Peralatan dan Mesin	90.439.600,00	0,00
29	Perolehan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
30	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
31	Perolehan Aset Tetap Lainnya	50.535.000,00	0,00
32	Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
33	Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00
34	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	140.974.600,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(140.974.600,00)	0,00
35	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**		
36	**Arus Masuk Kas**		
37	Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00
38	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
39	**Arus Keluar Kas**		
40	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00
41	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00
42	Penyetoran ke Kas Negara	(5.700.000,00)	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	(5.700.000,00)	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.700.000,00	0,00
43	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**		
44	**Arus Masuk Kas**		
45	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
46	**Arus Keluar Kas**		
47	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
48	**Kenaikan/ Penurunan Kas BLU**	8.627.695,00	0,00
49	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLU**	0,00	0,00
50	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU**	8.627.695,00	0,00

Karimun, 25 Mei 2026

Pimpinan BLUD SMKN Kundur
Provinsi Kepulauan Riau

Junaidah S, S.Pd., M.Pd
Penata Tingkat I (III/d)
NIP197611112003122008

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SMKN KUNDUR

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (BLUD)

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Ekuitas Awal		0.00	0.00
2	Surplus/Defisit-LO		(39,132,070.60)	0.00
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		3,543,219,229.00	0.00
4	Koreksi Nilai Persediaan		0.00	0.00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		0.00	0.00
6	Lain-lain		6,103,728.00	0.00
7	Ekuitas Akhir		**3,504,087,158.40**	**0.00**

Karimun, 25 Mei 2026

Pimpinan BLUD SMKN Kundur
Provinsi Kepulauan Riau

Junaidah S, S.Pd., M.Pd
Penata Tingkat I (III/d)
NIP197611112003122008

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Laporan Keuangan BLUD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran ;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan BLUD.
Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala BLUD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan BLUD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SMK Negeri Kundur Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan RiauTahun 2025.
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri Kundur

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri Kundur Tahun 2025, adalah tanggungjawab sepenuhnya BLUD SMK Negeri Kundur, dalam hal ini adalah Pimpinan BLUD SMK Negeri Kundur.

1.4 Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri Kundur tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri Kundur tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (*Subsequent Event*) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri Kundur tahun 2026. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2026.

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri Kundur adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri Kundur
- 1.4 Periode Pelaporan Keuangan
- 1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Profil BLUD SMK Negeri Kundur
- 2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri Kundur
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri Kundur
- 2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri Kundur tahun 2025

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Asumsi dasar Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- 4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja
- 4.7 Kebijakan Akuntansi Kas
- 4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan
- 4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- 4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Neraca
- 5.4 Laporan Operasional
- 5.5 Laporan Arus Kas
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.7 Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan atas informasi – Informasi non Keuangan
- 6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
- 6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

Bab VII Penutup

BAB II

PROFIL BLUD SMK NEGERI KUNDUR

2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri Kundur

Data bisa diperoleh dari RENSTRA Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kundur.

BLUD SMK Negeri Kundur memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten serta tenaga ahli yang mendukung pelaksanaan *Teaching Factory (TEFA)*. SDM yang tersedia meliputi:

1. Tenaga Pendidik (Guru Produktif dan Normatif):
   - Guru bersertifikasi keahlian industri sesuai bidang kompetensi.
   - Guru mata pelajaran umum yang mendukung kurikulum berbasis kompetensi.
   - Instruktur dari dunia industri yang terlibat dalam program pelatihan siswa.
2. Tenaga Kependidikan:
   - Staf administrasi yang mengelola keuangan dan operasional BLUD.
   - Teknisi laboratorium dan bengkel untuk mendukung kegiatan praktik.
   - Tenaga keamanan dan kebersihan untuk menjaga lingkungan sekolah yang kondusif.
3. Kemitraan dengan Industri:
   - Mengundang praktisi industri sebagai instruktur tamu.
   - Menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk program magang dan penyerapan tenaga kerja.
   - Mengembangkan skema sertifikasi kompetensi yang diakui dunia usaha dan industri.

Sebagai SMK BLUD yang berbasis *Teaching Factory* (TEFA) dan Unit Produksi (UP), sekolah telah memiliki berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran berbasis produksi dan layanan industri, di antaranya:

1. Ruang Kelas dan Laboratorium:
   - Ruang kelas berbasis IT untuk pembelajaran teori.
   - Laboratorium komputer untuk simulasi bisnis digital dan desain grafis.
   - Perpustakaan digital sebagai pusat referensi dan literasi siswa.
2. Workshop dan Bengkel TEFA / UP:
   - Lahan praktek/hidroponik untuk kegiatan tanaman
   - Workshop teknik bangunan untuk pelatihan konstruksi dan menggambar.
   - Workshop Teknik jaringan untuk kegiatan praktek pembelajaran Teknik jaringan computer
   - Workshop mekanisasi pertanian untuk kegiatan peraktek pembelajaran pengolahan hasil pertanian
   - workshop Teknik elektronika industry untuk kegiatan pembelajaran IoT
3. Fasilitas Pendukung:
   - Ruang pemasaran/minimart kombitary produk hasil Teaching Factory.
   - Area publik seperti kantin sekolah yang dikelola Bersama oleh warga sekolah.

Sebagai BLUD, SMK memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan Teaching Factory. Sumber dana
sekolah berasal dari:

1. Dana BOS dan APBD:
   - Digunakan untuk operasional sekolah, gaji guru, serta pengadaan bahan ajar dan alat praktik.
2. Pendapatan dari Unit Usaha TEFA:

- Hasil penjualan produk dari unit Teaching Factory.
- Jasa layanan seperti servis otomotif, desain grafis, atau catering.
- Kerjasama dengan industri dalam proyek tertentu.

3. Bantuan dari Pemerintah dan Swasta:
   - Hibah atau bantuan dari pemerintah untuk pengembangan kurikulum dan fasilitas.
   - Sponsor dari perusahaan yang mendukung pengembangan Teaching Factory.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri Kundur

Data bisa diperoleh dari RENSTRA Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kundur

2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri Kundur

Tabel Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
BLUD SMK Negeri Kundur

No	Unit Teaching Factory (TEFA)	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Keterangan
1	**TEFA Mekanisasi Pertanian**	Jasa Penyewaan Penggilingan Padi (RMU) / Beras / Jagung	2.000.000,00	1.000.000,00	50%	Terbatasnya jumlah petani atau kelompok tani yang melakukan panen pada periode tersebut
		Jasa Pembuatan Tralis / Jendela, Pintu, Tempat POT	1.500.000,00		0%	Keterbatasan promosi layanan TEFA
2	**TEFA Agrebisnis Tanaman**	Pupuk Organik , Kompos	1.500.000,00		0%	Keterbatasan bahan baku organik yang tersedia
		Starkit hidroponik	2.000.000,00		0%	Terbatasnya permintaan dari masyarakat
3	**TEFA Teknik Komputer & Jaringan (TKJ)**	Servis Komputer/Laptop	1.500.000,00		0%	Terbatasnya jumlah pelanggan atau pengguna jasa
		Pembuatan Kartu Nama,	1.500.000,00		0%	Kurangnya promosi sehingga pemesanan kartu nama melalui jasa percetakan yang sudah lebih dikenal
4	**TEFA Teknik Elektronika Industri**	Running Text	2.000.000,00		0%	Kurangnya promosi produk kepada calon pelanggan/Instansi
		APATALI (Alat Penjernih Tanah Liat)	1.500.000,00		0%	Proses pembuatan yang memerlukan ketelitian dan waktu pengerjaan tertentu
5	**TEFA Desain Pemodelan Informasi Bangunan**	Drafter	1.500.000,00		0%	Terbatasnya jumlah permintaan pekerjaan gambar dari pihak luar
		Konsultan Perencana	1.500.000,00		0%	Terbatasnya jumlah proyek atau permintaan jasa perencanaan
6	**Pendapatan dari Minimart Kombitary**		3.500.000,00	14.824.800,00	424%	Target tercapai
7	**Pendapatan dari**		8.000.000,00	7.523.500,00	97%	

No	Unit Teaching Factory (TEFA)	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Keterangan
	Penyewaan Kantin					

BAB III

INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja pada BLUD SMK, pada laporan keuangan ini digunakan sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat managemen yang digunakan untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran dan tujuan, untuk mewujudkan misi dan visi organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut akan disajikan data kinerja BLUD SMK Negeri Kundur Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target BLUD SMK Negeri Kundur Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
A. Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa					
1	Persentase kelulusan siswa	100%	100%	100%	Mencapai Target
2	Rata-rata nilai Ujian Kompetensi Keahlian (UKK)	≥ 80	82,5	103%	Mencapai target
3	Persentase siswa yang memperoleh sertifikasi kompetensi industri	70%	65%	93%	Beberapa siswa belum lulus uji sertifikasi
4	Persentase lulusan yang bekerja sesuai kompetensi dalam 6 bulan	60%	58%	97%	Hampir mencapai target, perlu peningkatan kemitraan
5	Persentase lulusan yang berwirausaha	10%	12%	120%	Melebihi target, program wirausaha berjalan baik
B. Kinerja Keuangan dan Unit Usaha BLUD					
6	Persentase pendapatan unit usaha BLUD terhadap biaya operasional sekolah	30%	28%	93%	Hampir mencapai target, strategi pemasaran perlu ditingkatkan
7	Efisiensi penggunaan dana BLUD sesuai rencana kerja	90%	95%	105%	Anggaran terserap dengan baik dan efektif
C. Kinerja Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)					
8	Jumlah kerja sama aktif dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	5 mitra	6 mitra	120%	Melebihi target, kerja sama dengan lebih banyak perusahaan
9	Persentase siswa yang menjalani magang industri	100%	100%	100%	Semua siswa telah menjalani magang
10	Jumlah produk atau jasa unggulan dari Teaching Factory (TEFA)	5 produk	4 produk	80%	Ada satu produk yang belum mencapai standar pasar
D. Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan					
11	Kepuasan siswa dan orang tua terhadap layanan pendidikan	85%	88%	103%	Melebihi target berdasarkan survei internal
12	Jumlah guru produktif bersertifikasi industri	75%	70%	93%	Hampir mencapai target, ada guru dalam proses sertifikasi

Berdasarkan tabel pencapaian, secara keseluruhan SMK BLUD telah mencapai rata-rata 98% dari target yang ditetapkan. Beberapa indikator bahkan melebihi target, seperti wirausaha lulusan, jumlah mitra industri, dan kepuasan

siswa. Namun, ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, seperti pencapaian sertifikasi kompetensi siswa dan pengembangan produk Teaching Factory. Untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memperkuat kemitraan dengan industri untuk meningkatkan jumlah lulusan yang bekerja sesuai kompetensi.
2. Optimalisasi pemasaran unit usaha BLUD untuk meningkatkan pendapatan sekolah.
3. Meningkatkan kesiapan siswa dalam uji sertifikasi industri melalui bimbingan tambahan.
4. Pengembangan produk Teaching Factory agar lebih kompetitif di pasar.

Dengan perbaikan strategi ini, diharapkan SMK BLUD dapat mencapai 100% target di tahun mendatang. (**contoh)**

3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Adapun hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target realisasi antara lain :

b. Hambatan dalam Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa

1. Kurangnya kesiapan siswa dalam ujian sertifikasi industri
   - Tidak semua siswa memiliki kesiapan yang cukup untuk lulus uji sertifikasi.
   - Kurangnya akses terhadap bahan ajar atau simulasi ujian sesuai standar industri.
   - Biaya sertifikasi yang masih menjadi kendala bagi sebagian siswa.
2. Tingkat kelulusan yang belum 100%
   - Beberapa siswa mengalami kesulitan dalam mata pelajaran teori maupun praktik.
   - Kurangnya motivasi belajar dan tingkat kehadiran siswa yang rendah.
3. Penyerapan lulusan ke dunia kerja belum optimal
   - Persaingan ketat di dunia kerja sehingga tidak semua lulusan langsung terserap.
   - Kurangnya pengalaman praktis yang relevan dengan kebutuhan industri.
   - Masih ada lulusan yang lebih memilih bekerja di luar bidang keahlian mereka.

b. Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan dan Unit Usaha BLUD

1. Pendapatan unit usaha BLUD belum mencapai target
   - Persaingan dengan produk atau jasa dari industri komersial yang lebih mapan.
   - Kurangnya strategi pemasaran dan branding produk/jasa SMK BLUD.
   - Keterbatasan modal untuk meningkatkan skala produksi dan inovasi produk.
2. Efisiensi penggunaan dana BLUD
   - Masih ada beberapa program yang belum berjalan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas.
   - Keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah atau sumber pendanaan lain.

c. Hambatan dalam Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)

1. Jumlah produk unggulan Teaching Factory belum optimal
   - Keterbatasan bahan baku atau alat produksi yang menyebabkan terhambatnya pengembangan produk baru.
   - Produk belum sepenuhnya sesuai standar pasar, sehingga masih butuh perbaikan dalam kualitas dan pemasaran.
2. Kemitraan industri masih perlu diperluas

- Tidak semua industri bersedia menerima siswa magang karena keterbatasan kapasitas mereka.
- Kurangnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja.

d. Hambatan dalam Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan

1. Tingkat kepuasan siswa dan orang tua belum maksimal
   - Beberapa siswa merasa materi pembelajaran masih kurang relevan dengan dunia kerja.
   - Orang tua belum sepenuhnya memahami konsep BLUD di SMK, sehingga kurang mendukung program sekolah.
2. Kurangnya jumlah guru bersertifikasi industri
   - Tidak semua guru memiliki kesempatan mengikuti pelatihan atau sertifikasi karena keterbatasan waktu dan biaya.
   - Masih ada kendala administratif dalam proses pengajuan sertifikasi guru ke lembaga industri terkait.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Akuntansi adalah BLUD SMK Negeri Kundur Provinsi Kepulauan Riau.

4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas;
b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri Kundur Provinsi Kepulauan Riau adalah:

a) ***Basis Kas*** untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam ***Laporan Realisasi Anggaran***
Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat Kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

b) ***Basis akrual*** untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam ***Neraca***
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

c) ***Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran*** berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riautidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

d) ***Basis akrual untuk neraca*** berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas;

4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengakuan dan pengukuran atas transaksi kejadian ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan ini adalah:

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.
   Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD , adalah sebagai berikut:
   a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
   b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;

c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri Kundur tahun 2025, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat Diterima pada Rekening Kas Umum. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum untuk seluruh transaksi setelah dilakukan pengesahan definitif bendahara. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

4.7 Kebijakan Akuntansi Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas secara umum diakui jika memenuhi kriteria:

a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.

4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari:

- Barang Konsumsi;
- Bahan untuk pemeliharaan;
- Suku cadang;
- Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
- Bahan baku;
- Barang dalam proses/setengah jadi;

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal; diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.

4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.

4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat

mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

BAB V

RINCIAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang telah disusun BLUD SMK Negeri Kundur periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini:

5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan – LRA

Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri Kundur mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp.623.759.661,00 atau sebesar 83% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 523.785.795,00 sebagaimana ikhtisar sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN**	**628.380.000,00**	**523.785.795,00**	**83,35**	**0,00**
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	20.000.000,00	15.824.800,00	79,12	0,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00	#NUM!	0,00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	8.000.000,00	7.523.500,00	94,04	0,00
6	Pendapatan Hibah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan APBN/APBD	500.380.000,00	500.380.000,00	100,00	0,00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	0,00	57.495,00	0,00	0,00
	Jumlah PENDAPATAN	**628.380.000,00**	**523.785.795,00**	**83,35**	**0,00**

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Tahun 2025 sebesar Rpxxxx,00 atau xx,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rpxxx,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Pendapatan TEFA Mekanisasi Pertanian	3.500.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
Pendapatan TEFA Agrebisnis Tanaman	3.500.000,00			
Pendapatan TEFA Teknik Komputer & Jaringan	3.000.000,00			
Pendapatan TEFA Teknik Elektronika Industri	3.500.000,00			
Pendapatan TEFA Desain Pemodelan Informasi bangunan	3.000.000,00			
Pendapatan dari Minimart Kombitary	3.500.000,00	14.824.800,00		14.824.800,00
Pendapatan dari Penyewaan Kantin	8.000.000,00	7.523.500,00		7.523.500,00

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	28.000.000,00	23.348.300,00		23.348.300,00

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah Tahun 2025 sebesar Rp 0 atau 0% dari anggaran yang ditargetkan Rp 100.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Hibah SPP				
Hibah Kementerian	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Dst.....				
Total Pendapatan BLUD dari Hibah	100.000.000,000	0,00	0,00	100.000.000,00

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Tahun 2025 sebesar Rp.7.523.500,00 atau 94,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.8.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
2	3	4	5	6
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	**8.000.000,00**	**7.523.500,00**	**94,04**	**0,00**
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	8.000.000,00	7.523.500,00	**94,04**	0,00
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	**8.000.000,00**	**7.523.500,00**	**94,04**	0,00

iv) Pendapatan BLUD dari APBD/APBN

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD/APBN Tahun 2025 sebesar Rp. 500,380,000,00 atau 100% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 500.380.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
2	3	4	5	6
PENDAPATAN TRANSFER	**500.380.000,00**	**500.380.000,00**	**100,00**	**0,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**500.380.000,00**	**500.380.000,00**	**100,00**	**0,00**
Dana Perimbangan	**500.380.000,00**	**500.380.000,00**	**100,00**	**0,00**
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	**500.380.000,00**	**500.380.000,00**	**100,00**	**0,00**
DAK Non Fisik-BOS Reguler	500.380.000,00	500.380.000,00	**100,00**	0,00
Total Pendapatan BLUD dari Transfer Pemerintah Pusat	**500.380.000,00**	**500.380.000,00**	**100,00**	

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp.31.361,00 atau 00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rpxxx,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
2	3	4	5	6
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	**0,00**	**31.361,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	0,00	31.361,00	**0,00**	0,00

b. Belanja

1. Belanja Pegawai BLUD

2. Berupa Belanja Gaji & Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan BLUD dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00 % dari total anggaran belanja pegawai BLUD yang sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Pegawai BLUD	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 487.405.400,00 atau 77,94% dari total anggaran belanja barang dan jasa yang sebesar Rp 487.405.400,00 dengan rincian sebagai berikut :.

Uraian	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Barang	**199.504.512,00**	**151.806.712,00**	**76,09**
Belanja Jasa	**86.903.238,00**	**71.753.238,00**	**82,57**
Belanja Pemeliharaan	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
Belanja Perjalanan Dinas	**199.997.650,00**	**155.323.550,00**	**77,66**
Total Belanja Barang dan Jasa BLUD	**487.405.400,00**	**379.883.500,00**	**77,94**

4. Belanja Modal BLUD

Belanja modal BLUD terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp. 90.439.600,00 atau 100,00% dari total anggaran belanja modal peralatan dan mesin yang sebesar, Rp. 90.439.600,00 belanja modal gedung dan bangunan yang terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari total anggaran belanja modal gedung dan bangunan yang sebesar Rp 0,00 belanja aset tetap lainnya yang sebesar Rp 50.535.000,00 atau 100% dari total anggaran Rp 50.535.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.439.600,00	90.439.600,00	100	90.439.600,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00			
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00			
Belanja Aset Tetap Lainnya	50.535.000,00	50.535.000,00	100	
Total Belanja Modal BLUD	140.974.600,00	140.974.600,00	100	140.974.600,00

5.2 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo awal SAL pada tahun 2025 sebesar Rp. 0,00 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

2) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan digunakan dalam rangka membiayai defisit tahun anggaran berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 0,00 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

3) Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SiLPA tahun 2025 sebesar Rp. 9.031.423,00

5.3 Neraca

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- Berupa kas/setara kas dan persediaan

Aset Lancar sebesar Rp. 9.005.289,00 yang dimiliki BLUD SMK Negeri Kundur per 31 Desember 2025 terdiri dari:

a. Kas di Bendahara BLUD

Kas BLUD adalah semua bentuk penerimaan dan pengeluaran uang tunai atau setara kas yang dikelola oleh SMK Negeri Kundur dalam rangka menjalankan operasionalnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, dan pendapatan lainnya. Pada tahun 2024 saldo Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp.8.601.561,00 dengan rincian :

Uraian	Jumlah
Kas di Bank	8.601.561,00
Rek Bank BRK Syariah BLUD SMK Negeri Kundur	
Rek Bank 1230300042	
Kas Tunai	
Total Kas di Bendahara BLUD	8.601.561,00

b. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan kas dibawah pengelolaan bendahara BOS yang bersumber dari pemerintah untuk mendukung operasional sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan tanpa membebani peserta didik. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BOS sebesar RP. 403.728,00 dengan rincian :

Uraian	Jumlah
Kas di Bank	403.728,00
Rek Bank xxxx	
Rek Bank xyx	
Kas Tunai	
Total Kas di Bendahara BOS	403.728,00

c. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 terdiri dari :

Uraian	Jumlah
Persediaan Barang Habis Pakai	
- Bahan	
- Suku Cadang	
Dst.....	
Persediaan BarangTidak Habis Pakai	
Dst....	
Total Persediaan	

2. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh pelayanan umum. Aset tetap sebesar Rp. 3.492.665.869,40 per 31 Desember 2025 merupakan nilai perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan yang pengadaannya bersumber dari pengelolaan dana BOS dan dana SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dan BLUD.

a. Tanah

Nilai aset tanah BLUD SMK Negeri Kundur per 31 Desember 2025 sebesar Rp.176.000.000,00 dan tidak terdapat penambahan aset tetap tanah selama tahun 2025.

b. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin BLUD SMK Negeri Kundur per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 3.492.665.869,40,- meningkat sebesar Rp. Rp. 3.492.665.869,40,- jika dibandingkan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp.1.011.134.101,00. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
	ASET TETAP		**3.492.665.869,40**	**0,00**
	Tanah		**176.000.000,00**	**0,00**
	Tanah		**176.000.000,00**	**0,00**
	Tanah Persil		**176.000.000,00**	**0,00**
	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja		176.000.000,00	0,00
	Peralatan dan Mesin		**1.011.134.101,00**	**0,00**

c. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan BLUD SMK Negeri Kundur per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.779.916.500,00 meningkat sebesar Rp 1.779.916.500,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp0,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
	Gedung dan Bangunan		**1.779.916.500,00**	**0,00**
	Bangunan Gedung		**1.779.916.500,00**	**0,00**
	Bangunan Gedung Tempat Kerja		**1.779.916.500,00**	**0,00**
	Bangunan Gedung Kantor		1.779.916.500,00	0,00

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD SMK Negeri Kundur per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 13.311.200,00 meningkat sebesar Rp 13.311.200,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp.0,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
	Jalan, Jaringan, dan Irigasi		**13.311.200,00**	**0,00**
	Jalan dan Jembatan		**13.311.200,00**	**0,00**
	Jalan		**13.311.200,00**	**0,00**
	Jalan Nasional		13.311.200,00	0,00

e. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Aset Tetap Lainnya BLUD SMK Negeri Kundur per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 631.595.700,00 meningkat sebesar Rp. 50.535.000,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp.0,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
	Aset Tetap Lainnya		**682.130.700,00**	**0,00**
	Bahan Perpustakaan		**682.130.700,00**	**0,00**
	Bahan Perpustakaan Tercetak		**682.130.700,00**	**0,00**
	Buku Umum		631.595.700,00	0,00
	Buku Agama		9.510.000,00	0,00
	Buku Ilmu Bahasa		3.870.000,00	0,00
	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam		2.520.000,00	0,00
	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis		34.635.000,00	0,00

3. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya dapat berupa Aset Tidak Berwujud dan Aset Rusak Berat/Tidak Digunakan Lagi dalam Operasional Kegiatan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri Kundur mencatat Aset Lainnya sebesar Rp. 2.416.000,00 terdiri dari Aset Tidak Berwujud (Software, dll) sebesar Rp0,00 dan Aset Rusak Berat/Tidak Digunakan Lagi dalam Operasional Kegiatan sebesar Rp2.416.000,00. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
	ASET LAINNYA		**2.416.000,00**	**0,00**
	Aset Lain-lain		**2.416.000,00**	**0,00**
	Aset Lain-lain		**2.416.000,00**	**0,00**
	Aset Lain-lain		**2.416.000,00**	**0,00**
	Aset Rusak Berat/Usang		2.416.000,00	0,00
	Jumlah ASET LAINNYA		**2.416.000,00**	**0,00**

4. Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri Kundur tidak memiliki kewajiban. (sesuaikan angka pada laporan neraca)

5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD SMK Negeri Kundur pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pada Tahun 2025 Ekuitas adalah sebesar Rp. 3,510,190,886.40

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
	EKUITAS		**3.504.113.292,40**	**0,00**
	EKUITAS		**3.504.113.292,40**	**0,00**
	Ekuitas		**3.504.113.292,40**	**0,00**
	Ekuitas		**3.504.113.292,40**	**0,00**
	Ekuitas		**3.504.113.292,40**	**0,00**
	Ekuitas		3.504.113.292,40	0,00
	Jumlah EKUITAS		**3.504.113.292,40**	**0,00**

5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional
b) Beban dari kegiatan operasional
c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
d) Pos luar biasa
e) Surplus/defisit LO

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional

Pendapatan LO dari kegiatan operasional terdiri dari :

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2025 sebesar Rp. 15,824,800,00 lebih tinggi/rendah dari Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	**15.824.800,00**	**0,00**	**15.824.800,00**	**100,00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	15.824.800,00	0,00	15.824.800,00	100,00

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2025 sebesar Rp.10,00 lebih tinggi/rendah dari pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan BLUD dari Hibah-LO	**100.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**100,00**
	Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat-LO	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO Tahun 2025 sebesar Rp7.523.500,00 lebih tinggi/rendah dari pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain sebesar Rp7.523.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	**7.523.500,00**	**0,00**	**7.523.500,00**	**100,00**
	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	7.523.500,00	0,00	7.523.500,00	100,00

`

iv) Pendapatan BLUD dari APBD/APBN LO

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD LO Tahun 2025 sebesar Rp. 500,380,000,00 lebih tinggi/rendah dari pendapatan BLUD dari APBD LO sebesar Rp 500.380.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Dana BOSP	500.380.000,00	500.380.000,00	100 %	500.380.000,00
Total Pendapatan APBD	500.380.000,00	500.380.000,00	100 %	500.380.000,00

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2025 sebesar Rp.31.361,00 lebih tinggi/rendah dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	**31.361,00**	**0,00**	**31.361,00**	**100,00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro-LO	31.361,00	0,00	31.361,00	100,00

b) Beban dari kegiatan operasional

1. Belanja Pegawai BLUD LO

Realisasi beban pegawai (Gaji & Tunjangan) selama tahun 2025 adalah sebesar Rp 0,0

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Beban barang dan jasa LO tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 662,891,731.60 lebih tinggi/rendah dari dari Beban barang dan jasa LO tahun 2024 yang sebesar Rpxxxx,00 dengan rincian sebagai berikut :.

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Beban Barang dan Jasa	**493.065.100,00**	**0,00**	**493.065.100,00**	**100,00**
	Beban Barang	**211.775.612,00**	**0,00**	**211.775.612,00**	**100,00**
	Beban Jasa	**86.903.238,00**	**0,00**	**86.903.238,00**	**100,00**
	Beban Pemeliharaan	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
	Beban Perjalanan Dinas	**193.386.250,00**	**0,00**	**193.386.250,00**	**100,00**
	Total Beban Barang dan Jasa BLUD	**493.065.100,00**		**493.065.100,00**	**100,00**

c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan dikelompokkan dalam kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional BLUD SMK Negeri Kundur tahun 2025 sebesar Rp. 0,00.

d) Surplus/defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan beban. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri Kundur mencatat surplus/Defisit LO sebesar
Rp. (39,132,070.60,00.)

5.5 Laporan Arus Kas

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi BLUD SMK Negeri Kundur dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi BLUD SMK Negeri Kundur pada Tahun 2025 sebesar Rp523.785.795,00 yang terdiri dari:

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	**Arus Masuk Kas**		
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	15.824.800,00	0,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	7.523.500,00	0,00
6	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
7	Pendapatan APBN/APBD	500.380.000,00	0,00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	57.495,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	523.785.795,00	0,00

b. Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi BLUD SMK Negeri Kundur selama Tahun 2025 sebesar Rp 379.883.500,00 terdiri dari:

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
9	**Arus Keluar Kas**		
10	Pembayaran Pegawai	0,00	0,00
11	Pembayaran Barang dan Jasa	179.033.312,00	0,00
12	Pembayaran Pemeliharaan	1.000.000,00	0,00
13	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	44.526.638,00	0,00
14	Pembayaran Perjalanan Dinas	155.323.550,00	0,00
15	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	379.883.500,00	0,00

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp 143.902.295,00 Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	143.876.161,00	

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset Non-Keuangan lainnya.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan di masa yang akan datang.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri Kundur pada Tahun 2025 sebesar Rpxx,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan Aset Tetap Tanah		
Penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin		
Penjualan Aset Tetap Gedung dan Bangunan		
Penjualan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
Penjualan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya		
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri Kundur pada Tahun 2025 sebesar Rp. 140.974.600,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Belanja Modal Tanah		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.439.600,00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.535.00,00	
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	**140.974.600,00**	

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp140.974.600,00 Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-140.974.600,00	

3) Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Periode 2025

Kenaikan/(penurunan) Kas Bersih Selama Periode Tahun 2025 merupakan akumulasi jumlah kenaikan/(penurunan) kas bersih dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris.

Selama Tahun Anggaran 2025 terjadi kenaikan/penurunan kas bersih sebesar Rpxx,00 yang terdiri dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rpxx,00 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rpxx,00. Perbandingan Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	8.627.695,00	

4) Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025

Saldo akhir kas per 31 Desember 2025 merupakan perhitungan Saldo Awal per 1 Januari 2025 ditambah (dikurangi) dengan kenaikan/ (penurunan) kas bersih selama periode tahun 2025.

Saldo akhir kas di BLUD SMK Negeri Kundur per 31 Desember 2025 sebesar Rpxx,00 didapat dari perhitungan saldo awal Tahun 2025 sebesar Rpxx,00 ditambah kenaikan/penurunan kas bersih selama periode tahun 2025 sebesar Rp Rpxx,00.

Total Saldo Kas BLUD SMK Negeri Kundur Per 31 Desember 2025 sebesar Rpxx,00 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas di BLUD	8.627.695,00	0
Kas Dana BOS	403.728,00	0
Saldo Akhir Kas		

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

a) Ekuitas awal
b) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti:
   1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
   2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas Akhir

a) Ekuitas Awal

Pada Tahun 2025 BLUD SMK Negeri Kundur mencatat ekuitas awal sebesar Rp.0,00 yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada laporan Tahun 2025. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jumlah Aset Tahun 2025 Rp. 3.504.113.292.,40
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025 Rp 0,00
- **Saldo Awal Ekuitas 2025** **Rp 3.504.113.292.,40**

b) Surplus/Defisit LO

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dalam Laporan Operasional Tahun 2025 tercatat sebesar Rp (39.105.936,60)

c) Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar Rp. 3.504.087.158.40 merupakan saldo kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Total Aset dan Total Kewajiban BLUD SMK Negeri Kundur Tahun 2025.

- Jumlah Aset Tahun 2025 Rp 3.504.113.292.,40
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025 Rp0,00
- **Saldo Awal Ekuitas 2025** **Rp 3.504.113.292.,40**

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

BLUD SMK Negeri Kundur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. .....

BLUD SMK Negeri Kundur beralamat di Jalan Besar Sawang KM.14 Sawang Selatan Kec. Kundur Barat Kab. Karimun Prov Kepulauan Riau

6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

BLUD SMK Negeri Kundur adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nirlaba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di , dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra BLUD SMK Negeri Kundur , sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala BLUD SMK Negeri Kundur

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri Kundur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun sebagai bentuk tanggung jawab BLUD SMK Negeri Kundur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, penyusunan laporan keuangan BLUD juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Secara umum pencapaian kinerja atas sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik, namun begitu masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang masih harus terus dibenahi dan menjadi perhatian oleh BLUD SMK Negeri Kundur

Dengan memperhatikan strategisnya peran sekolah dan besarnya tantangan yang dihadapi untuk mendukung Visi Misi Pendidikan Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, SMK Negeri Kundur Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja serta memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan industri. Melalui pendekatan berbasis kompetensi, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta pengelolaan keuangan yang transparan melalui sistem BLUD, sekolah ini berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan lulusan SMK dapat menjadi tenaga kerja yang unggul dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Akhir kata, BLUD SMK Negeri Kundur Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan dalam penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban kami dalam menyajikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

Karimun, 25 Mei 2026

Pimpinan BLUD SMKN Kundur
Provinsi Kepulauan Riau

Junaidah.S, S.Pd., M.Pd
Penata Tingkat I (III/d)
NIP197611112003122008

LAPORAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
SMK NEGERI KUNDUR UTARA
TAHUN 2025
(AUDITED)

Jl. Hang Tuah No. 009A, Tanjung Berlian Kota, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Kode Pos 29672

I. DAFTAR ISI

COVER 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 3
DAFTAR GAMBAR GRAFIK 3
DAFTAR LAMPIRAN 3
KATA PENGANTAR 3

II. DAFTAR TABEL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 6
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 8
NERACA 9
LAPORAN OPERASIONAL 11
LAPORAN ARUS KAS 13
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 15

III. DAFTAR GAMBAR-GRAFIK

IV. DAFTAR LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. BLUD SMK Negeri Kundur Utara adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri Kundur Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kami berharap dengan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) di Provinsi Kepulauan Riau.

Karimun, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD SMK Negeri Kundur Utara
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

YANTO, S.E
Penata TK I/IIId
NIP. 197705152009041002

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SMK Negeri Kundur Utara Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (iii) Neraca; (iv) Laporan Operasional (LO); (v) Laporan Arus Kas (LAK); (vi) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (vii) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Karimun, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD SMK Negeri Kundur Utara
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

YANTO, S.E
Penata TK I/IIId
NIP. 197705152009041002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMK Negeri Kundur Utara
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN**	**840.620.000,00**	**840.805.929,00**	**100,02**	**0,00**
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	1.400.000,00	1.378.000,00	98,43	0,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan APBN/APBD	839.220.000,00	839.220.000,00	100,00	0,00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	0,00	7.929,00	0,00	0,00
	Jumlah PENDAPATAN	**840.620.000,00**	**840.805.929,00**	**100,02**	**0,00**
9	**BELANJA**				
10	**BELANJA OPERASI**	**639.669.000,00**	**638.269.000,00**	**99,78**	**0,00**
11	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Barang dan Jasa	639.669.000,00	638.269.000,00	99,78	0,00
13	Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**BELANJA MODAL**	**200.951.000,00**	**200.951.000,00**	**100,00**	**0,00**
16	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Peralatan dan Mesin	116.991.000,00	116.991.000,00	100,00	0,00
18	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Aset Tetap Lainnya	83.960.000,00	83.960.000,00	100,00	0,00
21	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah BELANJA	**840.620.000,00**	**839.220.000,00**	**99,83**	**0,00**
	Surplus/ Defisit Sebelum Pembiayaan	**0,00**	**1.585.929,00**	**0,00**	**0,00**
22	**PENERIMAAN**				
23	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
24	Penggunaan SILPA	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Penerimaan dari Divestasi	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
27	**PENGELUARAN**				
28	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
29	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**0,00**	**0,00**	**#NUM!**	**0,00**
	Pembiayaan Neto	**0,00**	**0,00**	**#NUM!**	**0,00**

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
	Surplus/ Defisit	0,00	1.585.929,00	0,00	0,00

Karimun, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD SMK Negeri Kundur Utara
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

YANTO, S.E
Penata TK I/IIId
NIP. 197705152009041002

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SMK Negeri Kundur Utara

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2.1	0,00	0,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.2.2	0,00	0,00
3	Subtotal (1-2)		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SiKPA)	7.5.2.3	1.585.929,00	0,00
5	Subtotal (3+4)		1.585.929,00	0,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	7.5.2.6	1.585.929,00	0,00

Karimun, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD SMK Negeri Kundur Utara
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

YANTO, S.E
Penata TK I/IIId
NIP. 197705152009041002



NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMK Negeri Kundur Utara
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	REFF	2025	2024
2	3	4	5
ASET	**1.1.**	**706.932.637,69**	**0,00**
ASET LANCAR	**1.1.1.**	**1.585.929,00**	**0,00**
Kas di Bendahara Penerimaan	1.1.1.00.	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.1.1.01.	0,00	0,00
Kas di BLUD	1.1.1.02.	1.585.929,00	0,00
Kas Dana BOS	1.1.1.03.	0,00	0,00
Kas Dana PJSP	1.1.1.04.	0,00	0,00
Kas Lainnya Setara Kas	1.1.1.05.	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum	1.1.1.06.	0,00	0,00
Piutang Pajak	1.1.1.07.	0,00	0,00
Piutang Retribusi	1.1.1.08.	0,00	0,00
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.08.	0,00	0,00
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.09.	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.1.10.	0,00	0,00
Belanja dibayar dimuka	1.1.1.11.	0,00	0,00
Piutang Lainnya	1.1.1.12.	0,00	0,00
Persediaan Badan Layanan Umum	1.1.1.13.	0,00	0,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan	1.1.1.14.	0,00	0,00
Jumlah ASET LANCAR		1.585.929,00	0,00
ASET TETAP	**1.1.2.**	**705.346.708,69**	**0,00**
Tanah	1.1.2.01.	32.303.250,00	0,00
Peralatan dan Mesin	1.1.2.02.	500.824.250,00	0,00
Gedung dan Bangunan	1.1.2.03.	25.770.000,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.1.2.04.	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	1.1.2.05.	227.962.000,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.1.2.06.	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	1.1.2.07.	(81.512.791,31)	0,00
Jumlah ASET TETAP		705.346.708,69	0,00
PIUTANG JANGKA PANJANG	**1.1.3.**	**0,00**	**0,00**

Tagihan Penjualan Angsuran	1.1.3.01.	0,00	0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	1.1.3.02.	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.3.03.	0,00	0,00
Jumlah PIUTANG JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET LAINNYA	**1.1.4.**	**0,00**	**0,00**
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.1.4.01.	0,00	0,00
Dana Kelolaan	1.1.4.02.	0,00	0,00
Aset yang dibatasi Penggunaannya	1.1.4.03.	0,00	0,00
URAIAN	**REFF**	**2025**	**2024**
2	3	4	5
Aset Tak Berwujud	1.1.4.04.	0,00	0,00
Aset Lain - Lain	1.1.4.05.	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi	1.1.4.06.	0,00	0,00
Jumlah ASET LAINNYA		0,00	0,00
JUMLAH ASET		706.932.637,69	0,00
KEWAJIBAN	**1.2.**	**0,00**	**0,00**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**1.2.1.**	**0,00**	**0,00**
Utang Usaha	1.2.1.01.	0,00	0,00
Utang Pihak Ketiga	1.2.1.02.	0,00	0,00
Utang Pajak	1.2.1.03.	0,00	0,00
Utang Kepada KUN	1.2.1.04.	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.2.1.05.	0,00	0,00
Belanja yang masih harus dibayar	1.2.1.06.	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.2.1.07.	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.2.1.08.	0,00	0,00
Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**1.2.2.**	**0,00**	**0,00**
Utang Jangka Panjang	1.2.2.01.	0,00	0,00
Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		0,00	0,00

EKUITAS	**1.3.**	**706.932.637,69**	**0,00**
EKUITAS	**1.3.1.**	**706.932.637,69**	**0,00**
Ekuitas	1.3.1.01.	706.932.637,69	0,00
Jumlah EKUITAS		706.932.637,69	0,00
JUMLAH EKUITAS		706.932.637,69	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		706.932.637,69	0,00

Karimun, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD SMK Negeri Kundur Utara
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

YANTO, S.E
Penata TK I/IIId
NIP. 197705152009041002



LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SMK Negeri Kundur Utara

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	**PENDAPATAN**				
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	100,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00	0,00	0.00
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
5	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0.00
6	Pendapatan Usaha Lainnya	7.929,00	0,00	7.929,00	100,00
7	Pendapatan APBN/ APBD	839.220.000,00	0,00	839.220.000,00	100,00
	Jumlah PENDAPATAN	**840.805.929,00**	**0,00**	840.805.929,00	100,00
8	**BEBAN**				
9	Beban Pegawai	0,00	0,00	0,00	0.00
10	Beban Persediaan	359.818.432,00	0,00	359.818.432,00	100,00
11	Beban Jasa	29.333.433,00	0,00	29.333.433,00	100,00
12	Beban Pemeliharaan	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	100,00

13	Beban Langganan Daya dan Jasa	36.334.526,00	0,00	36.334.526,00	100,00
14	Beban Perjalanan Dinas	227.182.609,00	0,00	227.182.609,00	100,00
15	Beban Penyusutan Aset	81.512.791,31	0,00	81.512.791,31	100,00
16	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0.00
	Jumlah BEBAN	**739.131.791,31**	**0,00**	739.131.791,31	100,00
	Surplus/Defisit Operasional	**101.674.137,69**	**0,00**	101.674.137,69	100,00
17	**KEGIATAN NON OPERASIONAL**				
18	Surplus/ Defisit Penjualan Aset Nonlancar	0,00	0,00	0,00	0.00
19	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	0,00	0,00	0,00	0.00
20	Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0.00
	Jumlah Surplus/Defisit Dari KEGIATAN NON OPERASIONAL	**0,00**	**0,00**	0,00	0.00
	Surplus/Defisit Sebelum POS LUAR BIASA	**101.674.137,69**	**0,00**	101.674.137,69	100,00
21	**POS LUAR BIASA**				
22	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0.00
23	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0.00
	Jumlah POS LUAR BIASA	**0,00**	**0,00**	0,00	0.00
	Surplus/Defisit-LO	**101.674.137,69**	**0,00**	101.674.137,69	100,00

Karimun, 25 Mei 2026
PIMPINAN BLUD SMK Negeri Kundur Utara
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

YANTO, S.E
Penata TK I/IIId
NIP. 197705152009041002

LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SMK Negeri Kundur Utara

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	**Arus Masuk Kas**		
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	1.378.000,00	0,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	200.000,00	0,00
6	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
7	Pendapatan APBN/APBD	839.220.000,00	0,00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	7.929,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	840.805.929,00	0,00
9	**Arus Keluar Kas**		
10	Pembayaran Pegawai	0,00	0,00
11	Pembayaran Barang dan Jasa	369.801.865,00	0,00
12	Pembayaran Pemeliharaan	4.950.000,00	0,00
13	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	36.334.526,00	0,00
14	Pembayaran Perjalanan Dinas	227.182.609,00	0,00
15	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	638.269.000,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi	202.536.929,00	0,00
16	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
17	**Arus Masuk Kas**		
18	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
19	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
20	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
21	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
22	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
23	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
24	Penerimaan dari Divestasi	0,00	0,00
25	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Selain Kas	0,00	0,00

	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
26	**Arus Keluar Kas**		
27	Pembelian Tanah	0,00	0,00
28	Pembelian Peralatan dan Mesin	180.991.000,00	0,00
NO	**URAIAN**	**2025**	**2024**
1	2	3	4
29	Pembelian Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
30	Pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
31	Pembelian Aset Tetap Lainnya	83.960.000,00	0,00
32	Pembelian Aset Lainnya	0,00	0,00
33	Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00
34	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	280.951.000,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(280.951.000,00)	0,00
35	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**		
36	**Arus Masuk Kas**		
37	Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00
38	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
39	**Arus Keluar Kas**		
40	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00
41	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00
42	Penyetoran ke Kas Negara	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
43	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**		
44	**Arus Masuk Kas**		
45	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
46	**Arus Keluar Kas**		
47	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
48	**Kenaikan/ Penurunan Kas BLU**	1.505.929,00	0,00
49	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLU**	0,00	0,00
50	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU**	1.505.929,00	0,00

Karimun, 25 Mei 2026
PIMPINAN BLUD SMK Negeri Kundur Utara
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

YANTO, S.E
Penata TK I/IIId
NIP. 197705152009041002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMK Negeri Kundur Utara
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Ekuitas Awal		0,00	0,00
2	Surplus/Defisit-LO		101,674,137.69	0,00
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		605,258,500.00	0,00
4	Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
6	Lain-lain		0,00	0,00
7	Ekuitas Akhir		706,932,637.69	0,00

Karimun, 25 Mei 2026
PIMPINAN BLUD SMK Negeri Kundur Utara
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

YANTO, S.E
Penata TK I/IIId
NIP. 197705152009041002

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Laporan Keuangan BLUD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran ;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan BLUD.
Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala BLUD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan BLUD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SMK Negeri Kundur Utara Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan RiauTahun 2025.
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas peraturan gubernur nomor 75 tahun 2022 tentang kebijakan akuntansi.
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri Kundur Utara Tahun 2025, adalah tanggungjawab sepenuhnya BLUD SMK Negeri Kundur Utara, dalam hal ini adalah Pimpinan BLUD SMK Negeri Kundur Utara

1.4 Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri Kundur Utara tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri Kundur Utara tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (*Subsequent Event*) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri Kundur Utara tahun 2026. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2026.

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri Kundur Utara adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri Kundur Utara
- 1.4 Periode Pelaporan Keuangan
- 1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Profil BLUD SMK Negeri Kundur Utara
- 2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri Kundur Utara
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri Kundur Utara
- 2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri Kundur Utara tahun 2025

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Asumsi dasar Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- 4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja
- 4.7 Kebijakan Akuntansi Kas
- 4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan
- 4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- 4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Neraca
- 5.4 Laporan Operasional
- 5.5 Laporan Arus Kas
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.7 Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan atas informasi – Informasi non Keuangan
- 6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
- 6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

Bab VII Penutup

PROFIL
BLUD SMK Negeri Kundur Utara

2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri Kundur Utara

BLUD SMK Negeri Kundur Utara memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten serta tenaga ahli yang mendukung pelaksanaan *Teaching Factory (TEFA)*. SDM yang tersedia meliputi:

1. Tenaga Pendidik (Guru Produktif dan Normatif):
   - Guru bersertifikasi keahlian industri sesuai bidang kompetensi.
   - Guru mata pelajaran umum yang mendukung kurikulum berbasis kompetensi.
   - Instruktur dari dunia industri yang terlibat dalam program pelatihan siswa.
2. Tenaga Kependidikan:
   - Staf administrasi yang mengelola keuangan dan operasional BLUD.
   - Teknisi laboratorium dan bengkel untuk mendukung kegiatan praktik.
   - Tenaga keamanan dan kebersihan untuk menjaga lingkungan sekolah yang kondusif.
3. Kemitraan dengan Industri:
   - Mengundang praktisi industri sebagai instruktur tamu.
   - Menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk program magang dan penyerapan tenaga kerja.
   - Mengembangkan skema sertifikasi kompetensi yang diakui dunia usaha dan industri.

Sebagai SMK BLUD yang berbasis *Teaching Factory* (TEFA) dan Unit Produksi (UP), sekolah telah memiliki berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran berbasis produksi dan layanan industri, di antaranya:

1. Ruang Kelas dan Laboratorium:
   - Laboratorium komputer untuk simulasi bisnis digital dan desain grafis.
   - Perpustakaan sebagai pusat referensi dan literasi siswa.
2. Workshop dan Bengkel TEFA / UP:
   - Bengkel otomotif dengan peralatan servis kendaraan standar industri.
   - Workshop teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam standar industri.
3. Fasilitas Pendukung:
   - Area publik seperti kantin yang dikelola oleh uni produksi masing-masing workshop.

Sebagai BLUD, SMK memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan Teaching Factory. Sumber dana sekolah berasal dari:

1. Dana BOS dan APBD:
   - Digunakan untuk operasional sekolah, serta pengadaan bahan ajar dan alat praktik.
2. Pendapatan dari Unit Usaha TEFA:
   - Hasil penjualan produk dari unit Teaching Factory.
   - Jasa layanan seperti servis otomotif dan teknik pengelasan.
   - Kerjasama dengan industri dalam proyek tertentu.
3. Bantuan dari Pemerintah dan Swasta:
   - Hibah atau bantuan dari pemerintah untuk pengembangan kurikulum dan fasilitas.

- Sponsor dari perusahaan yang mendukung pengembangan Teaching Factory.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri Kundur Utara

Berdasarkan Pasal 41 Permendagri Nomor 79 tahun 2018, Renstra pada BLUD adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

Rencana Strategis Renstra SMK Negeri Kundur Utara memuat antara lain:

1. Rencana pengembangan layanan
2. Strategi dan arah kebijakan
3. Rencana program dan kegiatan
4. Rencana keuangan

2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri Kundur Utara

Tabel Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
BLUD SMK Negeri Kundur Utara

No	Unit Teaching Factory (TEFA)	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Keterangan
1	TEFA (UP TKR)	Servis mobil murah	400.000	578.000	100%	
2	TEFA (UP T.LAS)	Pengelasan	400.000	400.000	100%	
3	TEFA (UP TSM)	Servis motor	400.000	400.000	100%	

INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja pada BLUD SMK, pada laporan keuangan ini digunakan sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat managemen yang digunakan untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran dan tujuan, untuk mewujudkan misi dan visi organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut akan disajikan data kinerja BLUD SMK Negeri Kundur Utara Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target BLUD SMK Negeri Kundur Utara Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
A. Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa					
1	Persentase kelulusan siswa	100%	100%	98%	Mencapai Target
2	Rata-rata nilai Ujian Kompetensi Keahlian (UKK)	≥ 80	82,5	103%	Mencapai target
3	Persentase siswa yang memperoleh sertifikasi kompetensi industri	70%	65%	93%	Beberapa siswa belum lulus uji sertifikasi
4	Persentase lulusan yang bekerja sesuai kompetensi dalam 6 bulan	60%	58%	97%	Hampir mencapai target, perlu peningkatan kemitraan
5	Persentase lulusan yang berwirausaha	10%	12%	120%	Melebihi target, program wirausaha berjalan baik
B. Kinerja Keuangan dan Unit Usaha BLUD					
6	Persentase pendapatan unit usaha BLUD terhadap biaya operasional sekolah	30%	28%	93%	Hampir mencapai target, strategi pemasaran perlu ditingkatkan
7	Efisiensi penggunaan dana BLUD sesuai rencana kerja	90%	95%	105%	Anggaran terserap dengan baik dan efektif
C. Kinerja Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)					
8	Jumlah kerja sama aktif dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	3 mitra	2 mitra	64%	Belum diperoleh kerja sama mitra TKR
9	Persentase siswa yang menjalani magang industri	100%	100%	100%	Semua siswa telah menjalani magang
10	Jumlah produk atau jasa unggulan dari Teaching Factory (TEFA)	3 produk	1 produk	34%	Keterbatasan industry lingkungan sekolah
D. Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan					
11	Kepuasan siswa dan orang tua terhadap layanan pendidikan	85%	88%	103%	Melebihi target berdasarkan survei internal
12	Jumlah guru produktif bersertifikasi industri	54%	46%	93%	Hampir mencapai target, ada guru dalam proses sertifikasi

Berdasarkan tabel pencapaian, secara keseluruhan SMK BLUD telah mencapai rata-rata 98% dari target yang ditetapkan. Beberapa indikator bahkan melebihi target, seperti wirausaha lulusan, jumlah mitra industri, dan kepuasan siswa. Namun, ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, seperti

pencapaian sertifikasi kompetensi siswa dan pengembangan produk Teaching Factory. Untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memperkuat kemitraan dengan industri untuk meningkatkan jumlah lulusan yang bekerja sesuai kompetensi.
2. Optimalisasi pemasaran unit usaha BLUD untuk meningkatkan pendapatan sekolah.
3. Meningkatkan kesiapan siswa dalam uji sertifikasi industri melalui bimbingan tambahan.
4. Pengembangan produk Teaching Factory agar lebih kompetitif di pasar.

Dengan perbaikan strategi ini, diharapkan SMK BLUD dapat mencapai 100% target di tahun mendatang.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Adapun hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target realisasi antara lain :

b. Hambatan dalam Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa

1. Kurangnya kesiapan siswa dalam ujian sertifikasi industri
   - Tidak semua siswa memiliki kesiapan yang cukup untuk lulus uji sertifikasi.
   - Kurangnya akses terhadap bahan ajar atau simulasi ujian sesuai standar industri.
   - Biaya sertifikasi yang masih menjadi kendala bagi sebagian siswa.
2. Penyerapan lulusan ke dunia kerja belum optimal
   - Persaingan ketat di dunia kerja sehingga tidak semua lulusan langsung terserap.
   - Kurangnya pengalaman praktis yang relevan dengan kebutuhan industri.
   - Masih ada lulusan yang lebih memilih bekerja di luar bidang keahlian mereka.

b. Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan dan Unit Usaha BLUD

1. Pendapatan unit usaha BLUD belum mencapai target
   - Persaingan dengan produk atau jasa dari industri komersial yang lebih mapan.
   - Kurangnya strategi pemasaran dan branding produk/jasa SMK BLUD.
   - Keterbatasan modal untuk meningkatkan skala produksi dan inovasi produk.
2. Efisiensi penggunaan dana BLUD
   - Masih ada beberapa program yang belum berjalan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas.
   - Keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah atau sumber pendanaan lain.

c. Hambatan dalam Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)

1. Jumlah produk unggulan Teaching Factory belum optimal
   - Keterbatasan bahan baku atau alat produksi yang menyebabkan terhambatnya pengembangan produk baru.
   - Produk belum sepenuhnya sesuai standar pasar, sehingga masih butuh perbaikan dalam kualitas dan pemasaran.
2. Kemitraan industri masih perlu diperluas
   - Tidak semua industri bersedia menerima siswa magang karena keterbatasan kapasitas mereka.
   - Kurangnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja.

d. Hambatan dalam Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan

1. Tingkat kepuasan siswa dan orang tua belum maksimal

- Beberapa siswa merasa materi pembelajaran masih kurang relevan dengan dunia kerja.
- Orang tua belum sepenuhnya memahami konsep BLUD di SMK, sehingga kurang mendukung program sekolah.

2. Kurangnya jumlah guru bersertifikasi industri
   - Tidak semua guru memiliki kesempatan mengikuti pelatihan atau sertifikasi karena keterbatasan waktu dan biaya.
   - Masih ada kendala administratif dalam proses pengajuan sertifikasi guru ke lembaga industri terkait.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Akuntansi adalah BLUD SMK Negeri Kundur Utara Provinsi Kepulauan Riau.

4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas;
b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri Kundur Utara Provinsi Kepulauan Riau adalah:

a) ***Basis Kas*** untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam ***Laporan Realisasi Anggaran***
Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat Kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

b) ***Basis akrual*** untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam ***Neraca***
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

c) ***Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran*** berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riautidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

d) ***Basis akrual untuk neraca*** berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas;

4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengakuan dan pengukuran atas transaksi kejadian ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan ini adalah:

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.
   Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD , adalah sebagai berikut:
   a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
   b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
   c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;

d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri Kundur Utara tahun 2025, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat Diterima pada Rekening Kas Umum. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum untuk seluruh transaksi setelah dilakukan pengesahan definitif bendahara. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

4.7 Kebijakan Akuntansi Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas secara umum diakui jika memenuhi kriteria:

a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.

4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang

yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari:

- Barang Konsumsi;
- Bahan untuk pemeliharaan;
- Suku cadang;
- Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
- Bahan baku;
- Barang dalam proses/setengah jadi;

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal; diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.

4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.

4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa

pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

RINCIAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang telah disusun BLUD SMK SMK Negeri Kundur Utara periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini:

5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan – LRA

Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri Kundur Utara mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.585.929,00 atau sebesar 0,19% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.840.620.000,00 sebagaimana ikhtisar sebagai berikut:

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	**1.400.000**	**1.378.000**	**98,43**	**1.378.000**
Pendapatan BLUD dari Hibah	-	-	-	-
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	0	200.000	0%	200.000
Pendapatan BLUD dari APBD	839.220.000	839.220.000	100%	839.220.000
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	-	7.929	-	-
TOTAL PENDAPATAN BLUD	840.620.000	840,805,929	100.02%	1.585.929

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Tahun 2025 sebesar Rp. 1.378.000,00 atau 98,43% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 1.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Pendapatan TEFA (UP TKR)	**400.000**	**578.000**	**100%**	**578.000**
Pendapatan TEFA (UP TLAS)	**400.000**	**400.000**	**100%**	**400.000**
Pendapatan TEFA (UP TSM)	400.000	400.000	100%	400.000
Dst...				
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.200.000	1.378.000		1.378.000

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Hibah SPP	0	0		0
Hibah Kementerian	0	0		0
Dst.....	0	0		0
Total Pendapatan BLUD dari Hibah				

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Tahun 2025 sebesar Rp.200.000,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Pendapatan Hasil Kerja Sama	0	200.000	0	200.000
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain		200.000	0	200.000

iv) Pendapatan BLUD dari APBD/APBN

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD/APBN Tahun 2025 sebesar Rpxxxx,00 atau xx,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rpxxx,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Dana BOSP	839,220,000.00	839,220,000.00	100%	839,220,000.00
Dana BOSDA				
Dst.....				
Total Pendapatan BLUD dari APBD	839,220,000.00	839,220,000.00	100%	839,220,000.00

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023
CSR PT X	0	0	0	0
Sewa Gedung/Aula/Lab	0	0	0	0
Dst.....				
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	0	0	0	0

b. Belanja

1. Belanja Pegawai BLUD

Berupa Belanja Gaji & Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan BLUD dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00 % dari total anggaran belanja pegawai BLUD yang sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	0	0	0
Belanja Tambahan Penghasilan	0	0	0
Dst...			
Total Belanja Pegawai BLUD	0	0	0

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp.639,669,000.00 atau 0,00% dari total anggaran belanja barang dan jasa yang sebesar Rp.639,669,000.00 dengan rincian sebagai berikut :.

	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Barang dan jasa	639,669,000.00	638,269,000.00	99,78%
Belanja Pemeliharaan	0	0	0
Dst...	0	0	0
Total Belanja Barang dan Jasa BLUD	639,669,000.00	638,269,000.00	99,78%

3. Belanja Modal BLUD

Belanja modal BLUD terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp. 200,951,000.00 atau 100,00% dari total anggaran belanja modal peralatan dan mesin yang sebesar Rp. 200,951,000.00, belanja modal gedung dan bangunan yang terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total anggaran belanja modal gedung dan bangunan yang sebesar Rp0,00.....dst (lanjutkan jika ada belanja modal lainnya, ex jalan, irigasi dan jaringan) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116,991,000.00	116,991,000.00	100%	116,991,000.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Belanja Aset Tetap Lainnya	83,960,000.00	83,960,000.00	100%	83,960,000.00
Total Belanja Modal BLUD	200,951,000.00	200,951,000.00	100%	200,951,000.00

5.2 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo awal SAL pada tahun 2025 sebesar Rpxx,00 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

2) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan digunakan dalam rangka membiayai defisit tahun anggaran berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rpxx,00 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

3) Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan penerimaan

pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SiLPA tahun 2025 sebesar Rpxx,00

5.3 Neraca

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- Berupa kas/setara kas dan persediaan

Aset Lancar sebesar Rpxx,00 yang dimiliki BLUD SMK Negeri Kundur Utara per 31 Desember 2025 terdiri dari:

a. Kas di Bendahara BLUD

Kas BLUD adalah semua bentuk penerimaan dan pengeluaran uang tunai atau setara kas yang dikelola oleh SMK Negeri Kundur Utara dalam rangka menjalankan operasionalnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, dan pendapatan lainnya. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp. 1.585.929,00 dengan rincian :

Uraian	Jumlah
Rek pengeluaran BLUD SMK Negeri Kundur Utara Bank riau kepri syariah (1.230.100.010)	-
Kas BLUD SMK Negeri Kundur Utara BRK Syariah (1.230.100.011)	20.209.418,00
Kas BLUD di Bendahara penerimaan BLUD SMK Negeri Kundur Utara BRK Syariah (1.230.100.012)	2.911.00
Bantuan Biaya Personil Praktek Kerja Lapangan untuk Peserta Didik	(18.626.400,00)
Total Kas di Bendahara BLUD	1.585.929,00

b. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan kas dibawah pengelolaan bendahara BOS yang bersumber dari pemerintah untuk mendukung operasional sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan tanpa membebani peserta didik. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BOS sebesar RP. 0,00 dengan rincian :

Uraian	Jumlah
Kas di Bank	
Rek Bank BRK 111-38-00239	0
Kas Tunai	0
Total Kas di Bendahara BOS	0

c. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rpxxx,00 terdiri dari :

Uraian	Jumlah
Persediaan Barang Habis Pakai	0
- Baban	0
- Suku Cadang	0
Dst.....	

Persediaan BarangTidak Habis Pakai	-
Dst....	-
Total Persediaan	0

2. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh pelayanan umum. Aset tetap sebesar Rpxx,00 per 31 Desember 2025 merupakan nilai perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan yang pengadaannya bersumber dari pengelolaan dana BOS dan dana SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dan BLUD.

a. Tanah

Nilai aset tanah BLUD SMK Negeri Kundur Utara per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 32.303.250,00
dan tidak terdapat penambahan aset tetap tanah selama tahun 2025.

b. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin BLUD SMK Negeri Kundur Utara per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 500.824.250,00 meningkat sebesar Rp. 500.824.250,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp. 0 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	
Penambahan :	
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**500.824.250,00**
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	0
- Reklasifikasi dari Aset Tetap xxxxx	0
- Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kementerian xxx.....Dst	
Total Penambahan	
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel...Dst	
Total Pengurangan :	**0**
Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**500.824.250,00**

c. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan BLUD SMK Negeri Kundur Utara per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 25.770.000,00 meningkat sebesar Rp. 25.770.000,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp. 0 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	
Penambahan :	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.770.000,0
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	0
- Reklasifikasi dari Aset Tetap xxxxx	0

Uraian	Jumlah
- Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kementerian xxx.....Dst	0
Total Penambahan	**0**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel...Dst	
Total Pengurangan :	**0**
Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**25.770.000,0**

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD SMK Negeri Kundur Utara per 31 Desember 2025 sebesar Rpxx,00 meningkat sebesar Rpxx,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp.0 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**0**
Penambahan :	
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	0
- Reklasifikasi dari Aset Tetap xxxxx	0
- Hibah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kementerian xxx.....Dst	0
Total Penambahan	**0**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel...Dst	
Total Pengurangan :	**0**
Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**0**

e. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Aset Tetap Lainnya BLUD SMK Negeri Kundur Utara per 31 Desember 2025 sebesar Rpxx,00 meningkat sebesar Rp 227.962.000,00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 yang sebesar RP.0 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	**227.962.000,00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	227.962.000,00
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	0
- Reklasifikasi dari Aset Tetap xxxxx	0
- Hibah Aset Tetap Lainnya dari Kementerian xxx.....Dst	0
Total Penambahan	**0**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Lainnya	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel...Dst	
Total Pengurangan :	**0**
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya	**227.962.000,00**

3. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya dapat berupa Aset Tidak Berwujud dan Aset Rusak Berat/Tidak Digunakan Lagi dalam Operasional Kegiatan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri Kundur Utara mencatat Aset Lainnya sebesar Rpxx,00 terdiri dari Aset Tidak Berwujud (Software, dll) sebesar Rpxx,00 dan Aset Rusak Berat/Tidak Digunakan Lagi dalam Operasional Kegiatan sebesar Rpxx,00. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Lainnya	**0**
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Lainnya	0
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	0
- Reklasifikasi dari Aset Tetap xxxxx	0
- Hibah Aset Lainnya dari Kementerian xxx.....Dst	0
Total Penambahan	**0**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Lainnya	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel...Dst	
Total Pengurangan :	**0**
Saldo Akhir Aset Lainnya	**0**

4. Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pada tahun 2025 SMK Negeri Kundur Utara tidak memiliki kewajiban.

5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD SMK Negeri Kundur Utara pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pada Tahun 2025 Ekuitas adalah sebesar Rp706.932.637,69

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Ekuitas	**0**
- Surplus/Defisit LO	706.932.637,69
- Koreksi Ekuitas	0
Saldo Ekuitas Akhir	706.932.637,69

5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional
b) Beban dari kegiatan operasional
c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
d) Pos luar biasa

c) Surplus/defisit LO

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional

Pendapatan LO dari kegiatan operasional terdiri dari :

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2025 sebesar Rp.1.378.000,00 lebih tinggi/rendah dari Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan TEFA (UP TKR)	578.000	0	100%	Terjadi kenaikan
Pendapatan TEFA (UP TLAS)	400.000	0	100%	Terjadi kenaikan
Pendapatan TEFA (UP TSM)	400.000	0	100%	Terjadi kenaikan
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO	1.378.000	0	100%	

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2025 sebesar Rpxxxx,00 lebih tinggi/rendah dari pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2024 sebesar Rpxxx,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Hibah SPP	-			
Hibah Kementerian	-			
Dst.....	-			
Total Pendapatan BLUD dari Hibah LO				

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO Tahun 2025 sebesar Rpxxxx,00 lebih tinggi/rendah dari pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain sebesar Rpxxx,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan Hasil Kerja Sama	200,000.00		100%	Terjadi kenaikan
Kerjasama PT B				
Kantin S				
Kantin T				
Dst.....				
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO	200,000.00			

iv) Pendapatan BLUD dari APBD/APBN LO

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD LO Tahun 2025 sebesar Rp. 839,220,000,00 lebih tinggi/rendah dari pendapatan BLUD dari APBD LO sebesar Rp839,220,000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Dana BOSP	839,220,000.00	0	100%	839,220,000.00
Dana BOSDA				

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Dst.....				
Total Pendapatan BLUD dari APBD LO	**839,220,000.00**	**0**	**100%**	**839,220,000.00**

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2025 sebesar Rpxxxx,00 lebih tinggi/rendah dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2024 sebesar Rpxxx,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
CSR PT X	**0**	**0**	**0**	**0**
Sewa Gedung/Aula/Lab	**0**	**0**	**0**	**0**
Dst.....				
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO	0	0	0	0

b) Beban dari kegiatan operasional

1. Belanja Pegawai BLUD LO

Berupa Beban Gaji & Tunjangan dan Beban Tambahan Penghasilan BLUD LO dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rpxxxxx,00 lebih tinggi/rendah dari beban pegawai BLUD LO tahun 2024 yang sebesar Rpxxxx,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Gaji dan Tunjangan	0	0	0	0
Beban Tambahan Penghasilan	0	0	0	0
Dst...				
Total Beban Pegawai BLUD	0	0	0	0

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Beban barang dan jasa LO tahun 2025 terealisasi sebesar Rp.739,131,791.00 lebih tinggi/rendah dari dari Beban barang dan jasa LO tahun 2024 yang sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :.

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan
Beban Barang				
Beban Jasa	29,333,433.00		100%	29,333,433.00
Beban Pemeliharaan	4,950,000.00		100%	4,950,000.00
Beban persediaan	359,818,432.00		100%	359,818,432.00
Beban Langganan Daya dan Jasa	36,334,526.00		100%	36,334,526.00

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan
Beban Perjalanan Dinas	227,182,609.00		100%	227,182,609.00
Beban Penyusutan Aset	81,512,791.31		100%	81,512,791.31
Total Beban Barang dan Jasa BLUD	739,131,791.31		100%	739,131,791.31

c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan dikelompokkan dalam kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional BLUD SMK Negeri Kundur Utara tahun 2025 sebesar Rp. 101,674,137.69

d) Surplus/defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan beban. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri Kundur Utara mencatat surplus/Defisit LO sebesar Rp. 101,674,137.69.

5.5 Laporan Arus Kas

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi BLUD SMK Negeri Kundur Utara dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi BLUD SMK Negeri Kundur Utara pada Tahun 2025 sebesar Rp840,805,929,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1,378,000.00	0
Pendapatan BLUD dari Hibah	0	0
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	200,000.00	0
Pendapatan BLUD dari APBD	839,220,000.00	0
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	7,929.00	0
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	840,805,929.00	0

b. Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi BLUD SMK Negeri Kundur Utara selama Tahun 2025 sebesar Rpxx,00 terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Belanja Pegawai	0	
Belanja Barang dan Jasa	369,801,865.00	
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	638,269,000.00	

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp. 202,536,929.00, Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	202,536,929.00	0

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset Non-Keuangan lainnya.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan di masa yang akan datang.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri.... pada Tahun 2025 sebesar Rpxx,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan Aset Tetap Tanah	0	0
Penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0	0
Penjualan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0	0
Penjualan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0
Penjualan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	0	0
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	**0**	**0**

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri.... pada Tahun 2025 sebesar Rpxx,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Belanja Modal Tanah	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116,991,000.00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	83,960,000.00	0
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	**200,951,000.00**	**0**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp-200,951,000,00 Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-200,951,000.00	0

3) Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Periode 2025

Kenaikan/(penurunan) Kas Bersih Selama Periode Tahun 2025 merupakan akumulasi jumlah kenaikan/(penurunan) kas bersih dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris.

Selama Tahun Anggaran 2025 terjadi kenaikan/penurunan kas bersih sebesar Rp. 1,585,929,00 yang terdiri dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp. 1,585,929.00,00 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rpxx,00. Perbandingan Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	1,585,929.00	0

4) Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025

Saldo akhir kas per 31 Desember 2025 merupakan perhitungan Saldo Awal per 1 Januari 2025 ditambah (dikurangi) dengan kenaikan/ (penurunan) kas bersih selama periode tahun 2025.

Saldo akhir kas di BLUD SMK Negeri Kundur Utara per 31 Desember 2025 sebesar Rp1,585,929.00,00 didapat dari perhitungan saldo awal Tahun 2025 sebesar Rp0,00 ditambah kenaikan/penurunan kas bersih selama periode tahun 2025 sebesar Rp Rp1,585,929,00.
Total Saldo Kas BLUD SMK Negeri Kundur Utara Per 31 Desember 2025 sebesar Rp1,585,929,00 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas di BLUD	1,585,929.00	0
Kas Dana BOS	0	0
Saldo Akhir Kas	840,805,929.00	

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

a) Ekuitas awal
b) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti:
   1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
   2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas Akhir

a) Ekuitas Awal

Pada Tahun 2025 BLUD SMK Negeri Kundur Utara mencatat ekuitas awal sebesar Rp0,00 yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada laporan Tahun 2025. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jumlah Aset Tahun 2025 Rp. 0
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025 Rp0,00
- **Saldo Awal Ekuitas 2025** **Rp0,00**

b) Surplus/Defisit LO

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dalam Laporan Operasional Tahun 2025 tercatat sebesar Rp 101,674,137.69

c) Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar Rp. 706,932,637.69merupakan saldo kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Total Aset dan Total Kewajiban BLUD SMK Negeri Kundur Utara Tahun 2025.

- Jumlah Aset Tahun 2025 Rp 0
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025 Rpxx,00
- **Saldo Awal Ekuitas 2025** **Rp. 0**

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

BLUD SMK Negeri Kundur Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 1407 Tahun 2024

BLUD SMK Negeri Kundur Utara beralamat di Jl. Hang Tuah no 009A Tanjung Berlian Kota Kundur Utara Kab. Karimun Kepualauan Riau.

6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

BLUD SMK Negeri Kundur Utara adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nirlaba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di , dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra BLUD SMK Negeri Kundur Utara , sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala BLUD SMK Negeri Kundur Utara.

PENUTUP

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri Kundur Utara. Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun sebagai bentuk tanggung jawab BLUD SMK Negeri Kundur Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, penyusunan laporan keuangan BLUD juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Secara umum pencapaian kinerja atas sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik, namun begitu masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang masih harus terus dibenahi dan menjadi perhatian oleh BLUD SMK Negeri Kundur Utara.

Dengan memperhatikan strategisnya peran sekolah dan besarnya tantangan yang dihadapi untuk mendukung Visi Misi Pendidikan Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, SMK Negeri Kundur Utara Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja serta memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan industri. Melalui pendekatan berbasis kompetensi, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta pengelolaan keuangan yang transparan melalui sistem BLUD, sekolah ini berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan lulusan SMK dapat menjadi tenaga kerja yang unggul dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Akhir kata, BLUD SMK Negeri Kundur Utara Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan dalam penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban kami dalam menyajikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

Tanjungpinang, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD
SMK Negeri Kundur Utara
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

YANTO, S.E
Penata TK I/IIId
NIP. 197705152009041002

SMKN 1 SINGKEP



LAPORAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SMK NEGERI 1 SINGKEP TAHUN 2025 (AUDITED)

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
SMK Negeri 1 Singkep
Jl. Gergas, Desa Batu Berdaun, Kec. Singkep-Lingga
: 0776-7031731 : smkn1_singkep@yahoo.co.id
: www.smkn1singkep.sch.id

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
KATA PENGANTAR iv
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB vii
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN viii
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH x
C. NERACA xi
D. LAPORAN OPERASIONAL xii
E. LAPORAN ARUS KAS xv
F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS xvii
G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 2
1.3 Penangungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Singkep 3
1.4 Periode Pelaporan Keuangan 3
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 3
BAB II POFIL BLUD SMK NEGERI 1 SINGKEP
2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 1 Singkep 4
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 1 Singkep 5
2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 1 Singkep 5
BAB III INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET
Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan TA 2025 6
Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realitas 6
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Akuntansi .....
4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan 9
4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 9
4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan laporan Keuangan 9
4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan 10
4.6 Kebijakan Akuntasni Belanja 10
4.7 Kebijakan Akuntansi Kas 10

4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan 10
4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap 11
4.10. Kebijakam Akuntansi Kewajiban 12
BAB V RINCIAN POS POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 Penjelasan Pos pos Laporan Realisasi Anggaran 13
5.2 Penjelasan Pos pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 16
5.3 Neraca 16
5.4 Laporan Operasional 20
5.5 Laporan Arus Kas 23
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas 26
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi 28
6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas 28
BAB VII PENUTUP 29
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Anggaran dan Realisasi Program/ Kegiatan BLUD SMK Negeri 1 Singkep
Tabel. 2 Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target BLUD SMK Negeri 1 Singkep Tahun 2025
Tabel. 3 Pendapatan LRA
Tabel. 4 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan
Tabel. 5 Pendapatan BLUD dari Hibah
Tabel. 6 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain.....
Tabel. 7 Pendapatan BLUD dari APBD
Tabel. 8 Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah .....
Tabel. 9 Belanja Pegawai BLUD
Tabel. 10 Belanja Barang dan Jasa BLUD
Tabel. 11 Belanja Modal BLUD
Tabel. 12 Kas di Bendahara BLUD
Tabel. 13 Kas di Bendahara BOS
Tabel. 14 Persediaan
Tabel. 15 Peralatan dan Mesin
Tabel. 16 Gedung dan Bangunan
Tabel. 17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Tabel. 18 Aset Tetap Lainnya
Tabel. 19 Aset Lainnya
Tabel. 20 Ekuitas
Tabel. 21 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO
Tabel. 22 Pendapatan BLUD dari Hibah LO
Tabel. 23 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO.....
Tabel. 24 Pendapatan BLUD dari APBD LO
Tabel. 25 Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah LO
Tabel. 26 Belanja Pegawai BLUD LO
Tabel. 27 Belanja Barang dan Jasa BLUD
Tabel. 28 Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi
Tabel. 29 Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi
Tabel. 29.1 Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi
Tabel. 30 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi
Tabel. 31 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi
Tabel. 31.1 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi
Tabel. 32 Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Priode 2025
Tabel. 33 Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025

DAFTAR LAMPIRAN

REKENING KORAN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. BLUD SMK Negeri 1 Singkep adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Singkep mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kami berharap dengan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) di Provinsi Kepulauan Riau.

Lingga, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD SMK N 1 SINGKEP
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ZUSMAR ERFYN TULUS, S.Pi.
Penata Tk. I/IIId
NIP. 196903062006041011

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan SMK N 1 Singkep Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (iii) Neraca; (iv) Laporan Operasional (LO); (v) Laporan Arus Kas (LAK); (vi) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (vii) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lingga, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD SMK N 1 SINGKEP
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMK NEGERI 1 SINGKEP
DINAS PENDIDIKAN

ZUSMAR ERFYN TULUS, S.Pi.
Penata Tk. I/IIId
NIP. 196903062006041011

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SMKN 1 SINGKEP

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN**	**66,250,000.00**	**721,159,344.00**	**1,088.5**	**0,00**
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	56,250,000.00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00	#NUM	0,00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	0.00	6,000,000.00	100,00	0,00
6	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	#NUM	0,00
7	Pendapatan APBN/APBD	0.00	715,147,309.00	0.00	0,00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	10,000,000.00	12.035,00	0.12	0,00
	Jumlah PENDAPATAN	**66,250,000.00**	**721,159,344.00**	**1,088.5**	**0,00**
9	**BELANJA**				
10	**BELANJA OPERASI**	**19,775,810.00**	**430,481,863.00**	**2,176.8**	**0,00**
11	Belanja Pegawai	0,00	0,00	#NUM	0,00
12	Belanja Barang dan Jasa		430.481.863,00	94,46	0,00
13	Bunga	0,00	0,00	#NUM	0,00
14	Belanja Lain-lain	0,00	0,00	#NUM	0,00
15	**BELANJA MODAL**	**46,474,190.00**	**301,096,800.00**	**647.88**	**0,00**
16	Belanja Tanah	0,00	0,00	#NUM	0,00
17	Belanja Peralatan dan Mesin	46,474,190.00	224,607,800.00	483.30	0,00
18	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	#NUM	0,00
19	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	#NUM	0,00
20	Belanja Aset Tetap Lainnya	0.00	76,489,000.00	0.00	0,00
21	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	#NUM	0,00
	Jumlah BELANJA	**66,250,000.00**	**731,578,663.00**	**1,104.2**	**0,00**
	Surplus/ Defisit Sebelum Pembiayaan	**0,00**	**(10.419.319,00)**	**0,00**	**0,00**

22	**PENERIMAAN**				
23	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**0,00**	**49,492,691.00**	**0,00**	**0,00**
24	Penggunaan SILPA	0,00	49,492.691.00	0,00	0,00
25	Penerimaan dari Divestasi	0,00	0,00	#NUM	0,00
26	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00	#NUM	0,00
	Jumlah PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**0,00**	**49,492,691.00**	**0,00**	**0,00**
27	**PENGELUARAN**				
28	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI**	**0,00**	**0,00**	**#NUM**	**0,00**
29	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00	**#NUM**	0,00
30	Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00	**#NUM**	0,00
31	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00	**#NUM**	0,00
	Jumlah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	**0,00**	**0,00**	**#NUM**	**0,00**
	Pembiayaan Neto	**0,00**	**49,492,691.00**	**0,00**	**0,00**

No	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
	Surplus/ Defisit	**0,00**	**39,073,372.00**	**0,00**	**0,00**

Lingga, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD SMK N 1 SINGKEP
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ZUSMAR ERFYN TULUS, S.Pi.
Penata Tk. I/IIId
NIP. 196903062006041011

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SMKN 1 SINGKEP

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	**7.5.2.1**	0,00	0,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**7.5.2.2**	0,00	0,00
3	Subtotal (1-2)		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	**7.5.2.3**	(10,,419,319.00)	0,00
5	Subtotal (3+4)		(10,419,319.00)	0,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		49,492,691.00	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	**7.5.2.6**	39,073,372.00	0,00

Lingga, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD SMK N 1 SINGKEP
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ZUSMAR ERFYN TULUS, S.Pi.
Penata Tk. I/IIId
NIP. 196903062006041011

C. NERACA

PEMERINTAH KOTA KEPULAUAN RIAU

1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SMKN 1 SINGKEP

NERACA (BLUD)

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	**ASET**	**1.1.**	**6,192,391,488.12**	**0,00**
2	**ASET LANCAR**	**1.1.1.**	**55.865.372,00**	**0,00**
3	Kas di Bendahara Penerimaan	1.1.1.00.	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.1.1.01.	0,00	0,00
5	Kas di BLUD	1.1.1.02.	6,012,035.00	0,00
6	Kas Dana BOS	1.1.1.03.	33,061,337.00	0,00
7	Kas Dana P2SP	1.1.1.04.	0,00	0,00
8	Kas Lainnya Setara Kas	1.1.1.05.	0,00	0,00
9	Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum	1.1.1.06.	0,00	0,00
10	Piutang Pajak	1.1.1.07.	0,00	0,00
11	Piutang Retribusi	1.1.1.08.	0,00	0,00
12	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.08.	0,00	0,00
13	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	1.1.1.09.	0,00	0,00
14	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.1.10.	0,00	0,00
15	Belanja dibayar dimuka	1.1.1.11.	0,00	0,00
16	Piutang Lainnya	1.1.1.12.	0,00	0,00
17	Persediaan Badan Layanan Umum	1.1.1.13.	0,00	0,00
18	Kas Lainnya		16.792.000,00	0,00
19	Aset untuk Dikonsolidasikan	1.1.1.14.	0,00	0,00
	Jumlah ASET LANCAR		55.865.372,00	0,00
20	**ASET TETAP**	**1.1.2.**	**5,959,425,676.12**	**0,00**
21	Tanah	1.1.2.01.	403,897,000.00	0,00
22	Peralatan dan Mesin	1.1.2.02.	1,930,598,997.00	0,00
23	Gedung dan Bangunan	1.1.2.03.	3,513,392,000.00	0,00
24	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.1.2.04.	0.00	0,00
25	Aset Tetap Lainnya	1.1.2.05.	398,817,400.00	0,00

26	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.1.2.06.	0,00	0,00
27	Akumulasi Penyusutan	1.1.2.07.	(287,279,721.00)	0,00
	Jumlah ASET TETAP		5,959,425,676.12	0,00
28	**PIUTANG JANGKA PANJANG**	**1.1.3.**	**0,00**	**0,00**
29	Tagihan Penjualan Angsuran	1.1.3.01.	0,00	0,00
30	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	1.1.3.02.	0,00	0,00
31	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	1.1.3.03.	0,00	0,00
	Jumlah PIUTANG JANGKA PANJANG		0,00	0,00
32	**ASET LAINNYA**	**1.1.4.**	**193,892,440.00**	**0,00**
33	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.1.4.01.	0,00	0,00
34	Dana Kelolaan	1.1.4.02.	0,00	0,00
35	Aset yang dibatasi Penggunaannya	1.1.4.03.	0,00	0,00
36	Aset Tak Berwujud	1.1.4.04.	0,00	0,00

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
37	Aset Lain - Lain	1.1.4.05.	193,892,440.00	0,00
38	Akumulasi Amortisasi	1.1.4.06.	0,00	0,00
	Jumlah ASET LAINNYA		193,892,440.00	0,00
	JUMLAH ASET		6.209.183.488,12	0,00
39	**KEWAJIBAN**	**1.2.**	**0,00**	**0,00**
40	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**1.2.1.**	**0,00**	**0,00**
41	Utang Usaha	1.2.1.01.	0,00	0,00
42	Utang Pihak Ketiga	1.2.1.02.	0,00	0,00
43	Utang Pajak	1.2.1.03.	0,00	0,00
44	Utang Kepada KUN	1.2.1.04.	0,00	0,00
45	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.2.1.05.	0,00	0,00
46	Belanja yang masih harus dibayar	1.2.1.06.	0,00	0,00
47	Pendapatan Diterima Dimuka	1.2.1.07.	0,00	0,00
48	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.2.1.08.	0,00	0,00
	Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat		16.792.000,00	
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0,00	0,00
49	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**1.2.2.**	**0,00**	**0,00**
50	Utang Jangka Panjang	1.2.2.01.	0,00	0,00
	Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		0,00	0,00
51	**EKUITAS**	**1.3.**	**6,192,391,488.00**	**0,00**
52	**EKUITAS**	**1.3.1.**	**6,192,391,488.00**	**0,00**

53	Ekuitas	1.3.1.01.	6,192,391.488,12	0,00
	Jumlah EKUITAS		6,192,391.488,12	0,00
	JUMLAH EKUITAS		6,192,391.488,12	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**6.209.183.488,12**	**0,00**

Lingga, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD SMK N 1 SINGKEP
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ZUSMAR ERFYN TULUS, S.Pi.
Penata Tk. I/IIId
NIP. 196903062006041011

D. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KOTA KEPULAUAN RIAU

1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SMKN 1 SINGKEP

LAPORAN OPERASIONAL (BLUD)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	**PENDAPATAN**				
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	0,00	0,00	0	#NUM
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00	0,00	#NUM!
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama	6,000,000.00	0,00	6,000,000.00	100,00
5	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	#NUM!
6	Pendapatan Usaha Lainnya	12,035.00	0,00	12,035.,00	100,00
7	Pendapatan APBN/ APBD	715,147,309.00	0,00	715,147,309.00	100,00
	Jumlah PENDAPATAN	**721,159,344.00**	**0,00**	721,159,344.00	100,00
8	**BEBAN**				
9	Beban Pegawai	0,00	0,00	0,00	#NUM!
10	Beban Persediaan	213,561,078.00	0,00	213,561,185.00	100,00
11	Beban Jasa	63.925.900,00	0,00	63,25,900.00	100,00
12	Beban Pemeliharaan	0,00	0,00	0	#NUM
13	Beban Langganan Daya dan Jasa	62,957,078.00	0,00	62,957,078.00	100,00
14	Beban Perjalanan Dinas	125,433,500.00	0,00	125.433.500,00	100,00
15	Beban Penyusutan Aset	287,279,721.48	0,00	287,279,721.48	#NUM!
16	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	#NUM!
	Jumlah BEBAN	**753,157,384.48**	**0,00**	753,157,384.48	100,00
	Surplus/Defisit Operasional	**(31,998,040.48)**	**0,00**	(31,998,040.48)	100,00
17	**KEGIATAN NON OPERASIONAL**				

18	Surplus/ Defisit Penjualan Aset Nonlancar	0,00	0,00	0,00	#NUM
19	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	0,00	0,00	0,00	#NUM
20	Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	#NUM
	Jumlah Surplus/Defisit Dari KEGIATAN NON OPERASIONAL	**0,00**	**0,00**	0,00	#NUM
	Surplus/Defisit Sebelum POS LUAR BIASA	**(31,998,040.48)**	**0,00**	(31,998,040.48)	100,00
21	**POS LUAR BIASA**				
22	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0
23	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0
	Jumlah POS LUAR BIASA	**0,00**	**0,00**	0,00	#NUM!
	Surplus/Defisit-LO	**(31,998,040.48)**	**0,00**	(31,998,040.48)	100,00

Lingga, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD SMK N 1 SINGKEP
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ZUSMAR ERFYN TULUS, S.Pi.
Penata Tk. I/IIId
NIP. 196903062006041011

E. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SMKN 1 SINGKEP

LAPORAN ARUS KAS (BLUD)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	**Arus Masuk Kas**		
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	0	0,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	6,000,000.00	0,00
6	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
7	Pendapatan APBN/APBD	715,147,309.00	0,00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	12,035.00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	721,159,344.00	0,00
9	**Arus Keluar Kas**		
10	Pembayaran Pegawai	0,00	0,00
11	Pembayaran Barang dan Jasa	242,091,285.00	0,00
12	Pembayaran Pemeliharaan	0.00	0,00
13	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	62,957,078.00	0,00
14	Pembayaran Perjalanan Dinas	125,433,500.00	0,00
15	Pembayaran Bunga	0.00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	430,481,863.00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi	290,677,481.00	0,00
16	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
17	**Arus Masuk Kas**		
18	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
19	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
20	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
21	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
22	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

23	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
24	Penerimaan dari Divestasi	0,00	0,00
25	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
26	**Arus Keluar Kas**		
27	Perolehan Tanah	0,00	0,00
28	Perolehan Peralatan dan Mesin	0.00	0,00
NO	**URAIAN**	**2025**	**2024**
1	2	3	4
29	Perolehan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
30	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
31	Perolehan Aset Tetap Lainnya	76,489,000.00	0,00
32	Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
33	Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00
34	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	301,096,800.00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(301,096,800.00)	0,00
35	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**		
36	**Arus Masuk Kas**		
37	Penerimaan Pinjaman	49,492,691.00	0,00
38	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
39	**Arus Keluar Kas**		
40	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00
41	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00
42	Penyetoran ke Kas Negara	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	49,492,691.00	0,00
43	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**		
44	**Arus Masuk Kas**		
45	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
46	**Arus Keluar Kas**		
47	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
48	**Kenaikan/ Penurunan Kas BLU**	39,073,372.00	0,00

49	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLU**	0.00	0,00
50	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU**	39,073,372.00	0,00

Lingga, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD SMK N 1 SINGKEP
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ZUSMAR ERFYN TULUS, S.Pi.
Penata Tk. I/IIId
NIP. 196903062006041011

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1.02.02. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SMKN 1 SINGKEP

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (BLUD)

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Ekuitas Awal		0,00	0,00
2	Surplus/Defisit-LO		(31,998,040.48)	0,00
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		6,174,896,837.60	0,00
4	Koreksi Nilai Persediaan		0.00	0,00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
6	Lain-lain		49,492,691.00	0,00
7	Ekuitas Akhir		**6,192,391,488.12**	**0,00**

Lingga, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD SMK N 1 SINGKEP
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ZUSMAR ERFYN TULUS, S.Pi.
Penata Tk. I/IIId
NIP. 196903062006041011

I. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Laporan Keuangan BLUD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran ;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan BLUD.
Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala BLUD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan

2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan BLUD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SMK NegerI 1 Singkep Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan RiauTahun 2025.
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 tahun 2024 tenteng Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Singkep Tahun 2025, adalah tanggungjawab sepenuhnya BLUD SMK Negeri 1 Singkep, dalam hal ini adalah Pimpinan BLUD SMK Negeri 1 Singkep

1.4 Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Singkep tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Singkep tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (*Subsequent Event*) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Singkep tahun 2026. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2026.

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Singkep adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Singkep
- 1.4 Periode Pelaporan Keuangan
- 1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Profil BLUD SMK Negeri 1 Singkep
- 2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 1 Singkep
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 1 Singkep
- 2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 1 Singkep tahun 2025

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Asumsi dasar Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- 4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja
- 4.7 Kebijakan Akuntansi Kas
- 4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan
- 4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- 4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Neraca
- 5.4 Laporan Operasional
- 5.5 Laporan Arus Kas
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.7 Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan atas informasi – Informasi non Keuangan
- 6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
- 6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

Bab VII Penutup

BAB II

PROFIL BLUD SMK NEGERI 1 SINGKEP

2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 1 Singkep

Data bisa diperoleh dari RENSTRA Sekolah Menengah Kejuruan dst

BLUD SMK Negeri 1 Singkep memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten serta tenaga ahli yang mendukung pelaksanaan *Teaching Factory (TEFA)*. SDM yang tersedia meliputi:

1. Tenaga Pendidik (Guru Produktif dan Normatif):
   - Guru bersertifikasi keahlian industri sesuai bidang kompetensi.
   - Guru mata pelajaran umum yang mendukung kurikulum berbasis kompetensi.
   - Instruktur dari dunia industri yang terlibat dalam program pelatihan siswa.
2. Tenaga Kependidikan:
   - Staf administrasi yang mengelola keuangan dan operasional BLUD.
   - Teknisi laboratorium dan bengkel untuk mendukung kegiatan praktik.
   - Tenaga keamanan dan kebersihan untuk menjaga lingkungan sekolah yang kondusif.
3. Kemitraan dengan Industri:
   - Mengundang praktisi industri sebagai instruktur tamu.
   - Menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk program magang dan penyerapan tenaga kerja.
   - Mengembangkan skema sertifikasi kompetensi yang diakui dunia usaha dan industri.

Sebagai SMK BLUD yang berbasis *Teaching Factory* (TEFA) dan Unit Produksi (UP), sekolah telah memiliki berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran berbasis produksi dan layanan industri, di antaranya:

1. Ruang Kelas dan Laboratorium:
   - Ruang kelas berbasis IT untuk pembelajaran teori.
   - Laboratorium komputer untuk simulasi bisnis digital dan desain grafis.
   - Perpustakaan digital sebagai pusat referensi dan literasi siswa.
2. Workshop dan Bengkel TEFA / UP:
   - Bengkel otomotif dengan peralatan servis kendaraan standar industri.
   - Dapur produksi kuliner yang dilengkapi dengan peralatan skala industri.
   - Studio desain dan multimedia untuk produksi konten digital dan video.
   - Workshop teknik bangunan untuk pelatihan konstruksi dan produksi material.
3. Fasilitas Pendukung:
   - Asrama atau tempat tinggal bagi siswa yang berasal dari luar daerah.
   - Ruang pemasaran produk hasil Teaching Factory.
   - Area publik seperti kantin dan koperasi sekolah yang dikelola oleh siswa.

Sebagai BLUD, SMK memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan Teaching Factory. Sumber dana sekolah berasal dari:

1. Dana BOS dan APBD:
   - Digunakan untuk operasional sekolah, gaji guru, serta pengadaan bahan ajar dan alat praktik.
2. Pendapatan dari Unit Usaha TEFA:
   - Hasil penjualan produk dari unit Teaching Factory.

- Jasa layanan seperti servis otomotif, desain grafis, atau catering.
- Kerjasama dengan industri dalam proyek tertentu.

3. Bantuan dari Pemerintah dan Swasta:
   - Hibah atau bantuan dari pemerintah untuk pengembangan kurikulum dan fasilitas.
   - Sponsor dari perusahaan yang mendukung pengembangan Teaching Factory.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 1 Singkep

Data bisa diperoleh dari RENSTRA Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Singkep Tahun 2021 – 2026, seperti:

1.Visi dan Misi serta arah tujuan BLUD
2.Analisa Situasi
3.Tujuan Strategis
4.Strategi dan program
5.Indikator Kinerja

2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 1 Singkep

Tabel Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
BLUD SMK Negeri 1 Singkep

No	Unit Teaching Factory (TEFA)	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Keterangan
1	**TEFA Otomotif**	Servis motor murah	14,000,000.00	0	0%	Belum terlaksana karena kendala SDM
2	**TEFA DKV**	Produksi Sovenir dan Photografer	14,000,000.00	0	0%	Belum terlaksana karena kendala SDM
3	**TEFA Teknik Komputer & Jaringan (TKJ)**	Jasa perbaikan laptop dan komputer	14,000,000.00	0	0%	Belum terlaksana karena kendala SDM
4	**TEFA Layanan Perbankan**	Layanan Bank Mini	14,250,000.00	0	0%	Belum terlaksana karena kendala SDM

BAB III

INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja pada BLUD SMK, pada laporan keuangan ini digunakan sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat managemen yang digunakan untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran dan tujuan, untuk mewujudkan misi dan visi organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut akan disajikan data kinerja BLUD SMK Negeri 1 Singkep Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target BLUD SMK Negeri 1 Singkep Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
A. Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa					
1	Persentase kelulusan siswa	100%	100%	100%	Mencapai Target
2	Rata-rata nilai Ujian Kompetensi Keahlian (UKK)	≥ 80	82,5	103%	Mencapai target
3	Persentase siswa yang memperoleh sertifikasi kompetensi industri	30%	0%	0%	Belum ada siswa lulus uji sertifikasi
4	Persentase lulusan yang bekerja sesuai kompetensi dalam 6 bulan	50%	30%	60%	Hampir mencapai target, perlu peningkatan kemitraan
5	Persentase lulusan yang berwirausaha	10%	10%	100%	Sesuai target, program wirausaha berjalan baik
B. Kinerja Keuangan dan Unit Usaha BLUD					
6	Persentase pendapatan unit usaha BLUD terhadap biaya operasional sekolah	0%	0%	0%	Belum terlaksana karena kendala SDM
7	Efisiensi penggunaan dana BLUD sesuai rencana kerja	0%	0%	0%	Belum terlaksana karena kendala SDM
C. Kinerja Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)					
8	Jumlah kerja sama aktif dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	4 mitra	4 mitra	100%	Sesuai target, kerja sama dengan lebih banyak perusahaan
9	Persentase siswa yang menjalani magang industri	100%	100%	100%	Semua siswa telah menjalani magang
10	Jumlah produk atau jasa unggulan dari Teaching Factory (TEFA)	4 produk	0 produk	0%	Belum terlaksana karena kendala SDM
D. Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan					
11	Kepuasan siswa dan orang tua terhadap layanan pendidikan	85%	88%	103%	Melebihi target berdasarkan survei internal
12	Jumlah guru produktif bersertifikasi industri	75%	70%	93%	Hampir mencapai target, ada guru dalam proses sertifikasi

Berdasarkan tabel pencapaian, secara keseluruhan SMK BLUD telah mencapai rata-rata 60% dari target yang ditetapkan. Beberapa indikator bahkan melebihi target, seperti wirausaha lulusan, jumlah mitra industri, dan kepuasan siswa. Namun, ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, seperti pencapaian sertifikasi kompetensi siswa dan pengembangan produk Teaching Factory. Untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memperkuat kemitraan dengan industri untuk meningkatkan jumlah lulusan yang bekerja sesuai kompetensi.
2. Optimalisasi pemasaran unit usaha BLUD untuk meningkatkan pendapatan sekolah.
3. Meningkatkan kesiapan siswa dalam uji sertifikasi industri melalui bimbingan tambahan.
4. Pengembangan produk Teaching Factory agar lebih kompetitif di pasar.

Dengan perbaikan strategi ini, diharapkan SMK BLUD dapat mencapai 100% target di tahun mendatang.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Adapun hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target realisasi antara lain :

b. Hambatan dalam Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa

1. Kurangnya kesiapan siswa dalam ujian sertifikasi industri
   - Tidak semua siswa memiliki kesiapan yang cukup untuk lulus uji sertifikasi.
   - Kurangnya akses terhadap bahan ajar atau simulasi ujian sesuai standar industri.
   - Biaya sertifikasi yang masih menjadi kendala bagi sebagian siswa.
2. Tingkat kelulusan yang belum 100%
   - Beberapa siswa mengalami kesulitan dalam mata pelajaran teori maupun praktik.
   - Kurangnya motivasi belajar dan tingkat kehadiran siswa yang rendah.
3. Penyerapan lulusan ke dunia kerja belum optimal
   - Persaingan ketat di dunia kerja sehingga tidak semua lulusan langsung terserap.
   - Kurangnya pengalaman praktis yang relevan dengan kebutuhan industri.
   - Masih ada lulusan yang lebih memilih bekerja di luar bidang keahlian mereka.

b. Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan dan Unit Usaha BLUD

1. Pendapatan unit usaha BLUD belum mencapai target
   - Persaingan dengan produk atau jasa dari industri komersial yang lebih mapan.
   - Kurangnya strategi pemasaran dan branding produk/jasa SMK BLUD.
   - Keterbatasan modal untuk meningkatkan skala produksi dan inovasi produk.
2. Efisiensi penggunaan dana BLUD
   - Masih ada beberapa program yang belum berjalan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas.
   - Keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah atau sumber pendanaan lain.

c. Hambatan dalam Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)

1. Jumlah produk unggulan Teaching Factory belum optimal
   - Keterbatasan bahan baku atau alat produksi yang menyebabkan terhambatnya pengembangan produk baru.

- Produk belum sepenuhnya sesuai standar pasar, sehingga masih butuh perbaikan dalam kualitas dan pemasaran.

2. Kemitraan industri masih perlu diperluas
   - Tidak semua industri bersedia menerima siswa magang karena keterbatasan kapasitas mereka.
   - Kurangnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja.

d. Hambatan dalam Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan

1. Tingkat kepuasan siswa dan orang tua belum maksimal
   - Beberapa siswa merasa materi pembelajaran masih kurang relevan dengan dunia kerja.
   - Orang tua belum sepenuhnya memahami konsep BLUD di SMK, sehingga kurang mendukung program sekolah.
2. Kurangnya jumlah guru bersertifikasi industri
   - Tidak semua guru memiliki kesempatan mengikuti pelatihan atau sertifikasi karena keterbatasan waktu dan biaya.
   - Masih ada kendala administratif dalam proses pengajuan sertifikasi guru ke lembaga industri terkait.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Akuntansi adalah BLUD SMK Negeri 1 Singkep Provinsi Kepulauan Riau.

4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas;
b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Singkep Provinsi Kepulauan Riau adalah:

a) ***Basis Kas*** untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam ***Laporan Realisasi Anggaran***
Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat Kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

b) ***Basis akrual*** untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam ***Neraca***
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

c) ***Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran*** berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riautidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

d) ***Basis akrual untuk neraca*** berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas;

4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengakuan dan pengukuran atas transaksi kejadian ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan ini adalah:

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.
   Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD , adalah sebagai berikut:
   a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
   b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;

c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Singkep tahun 2025, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat Diterima pada Rekening Kas Umum. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum untuk seluruh transaksi setelah dilakukan pengesahan definitif bendahara. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

4.7 Kebijakan Akuntansi Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas secara umum diakui jika memenuhi kriteria:

a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.

4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari:

- Barang Konsumsi;
- Bahan untuk pemeliharaan;
- Suku cadang;
- Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
- Bahan baku;
- Barang dalam proses/setengah jadi;

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal; diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.

4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.

4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

BAB V RINCIAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang telah disusun BLUD SMK Negeri 1 Singkep periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan – LRA

Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Singkep mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp721,159,344.00 atau sebesar 1,088.5% dari target yang ditetapkan sebesar Rp66,250,000.00 sebagaimana ikhtisar sebagai berikut:

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	**56,250,000.00**	**0**	**0%**	Belum terlaksana karena kendala SDM
Pendapatan BLUD dari Hibah	**0.00**	**0,00**	**0%**	Belum terlaksana karena kendala SDM
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	0.00	6,000,000.00	100 %	Mencapai Target
Pendapatan BLUD dari APBD	0.00	715,147,309.00	0%	Belum terlaksana karena kendala SDM
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	10,000,00.00	12,035.00	0%	Belum terlaksana karena kendala SDM
TOTAL PENDAPATAN BLUD	66,250,000.00	721,159,344.00	1,088.5 %	Mencapai Target

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 56,250,000.00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Pendapatan TEFA Otomotif	**14,000,000.00**	**0**	**0 %**	Belum terlaksana karena kendala SDM
Pendapatan TEFA DKV	**14,000,000.00**	**0**	**0 %**	Belum terlaksana karena kendala SDM
Pendapatan TEFA TKJ	14,000,000.0	0	0 %	Belum terlaksana karena kendala SDM

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Pendapatan TEFA Layanan Perbankan	14,250,000.00	0	%	m terlaksana karena kendala SDM
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	56,250,000.00	0	0 %	Belum terlaksana karena kendala SDM

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Hibah SPP	**0**	**0**	**0 %**	
Hibah Kementerian	**0**	**0**	**0 %**	
Total Pendapatan BLUD dari Hibah	0	0	0 %	

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Tahun 2025 sebesar Rp 6,000,000.00 atau 100,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023
Kerjasama Kantin	**0**	**0**	**0 %**	
Kerjasama PT B	**0**	**0**	**0 %**	
Kantin	0.00	6,000,000.00	100 %	
Kantin				
Dst.....				
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	0.00	6,000,000.00	100 %	

iv) Pendapatan BLUD dari APBD/APBN

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD/APBN Tahun 2025 sebesar Rp715,147,309.00 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp0.00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Dana BOSP	**0**	**715,147,309.00**	**0 %**	Belum terlaksana karena kendala SDM
Dana BOSDA	**0**	**0**	**0 %**	
Total Pendapatan BLUD dari APBD	0	715,147,309.00	0 %	

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp12,035.00 atau 0.12% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp10,000,000.00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2023
Lain-lain pendapatan BLUD yang Sah	10,000,000.00	12,035.00	0.12%	
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	**10,000,000.00**	**12,035.00**	**0.12%**	

b. Belanja

1. Belanja Pegawai BLUD

Berupa Belanja Gaji & Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan BLUD dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00 % dari total anggaran belanja pegawai BLUD yang sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	0	0	0%
Belanja Tambahan Penghasilan	0	0	0%
Total Belanja Pegawai BLUD	0	0	0%

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp430,481,863.00 atau 2,176.8% dari total anggaran belanja barang dan jasa yang sebesar Rp19,775,810.00 dengan rincian sebagai berikut :.

	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Barang dan Jasa	19,775,810.00	430,481,863.00	2,176.8%
Bunga	0	0	0%
Belanja Pemeliharaan	0	0	0%
Total Belanja Barang dan Jasa BLUD	19,775,810.00	430,481,863.00	2,176.8%

3. Belanja Modal BLUD

Belanja modal BLUD terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp301,096,800.00 atau 647.88% dari total anggaran belanja modal peralatan dan mesin yang sebesar Rp46,474,190.00, belanja modal gedung dan bangunan yang terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total anggaran belanja modal gedung dan bangunan yang sebesar Rp0,00., Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang terrealisasi sebesar Rp. 0.00 atau 0.00% dari total anggaran belanja modal gedung dan bangunan yang sebesar Rp. 0.00.,Belanja aset tetap lainnya yang terrealisasi sebesar Rp.76,489,000.00 atau 0.00% dari total anggaran belanja modal gedungdan bangunanyang sebesar Rp.0.00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2025
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46,474,190.00	224,607,800.00	483%	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0%	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0%	
Belanja Aset tetap Lainnya	0.00	76,489,000.00	0%	
Total Belanja Modal BLUD	46,474.190.00	301,096,800.00	647%	

5.2 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo awal SAL pada tahun 2025 sebesar Rp0,00 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

2) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan digunakan dalam rangka membiayai defisit tahun anggaran berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024.

3) Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SiLPA tahun 2025 sebesar Rp0,00

5.3 Neraca

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- Berupa kas/setara kas, kas lainnya dan persediaan

Aset Lancar sebesar Rp 55,865,372.00 yang dimiliki BLUD SMK Negeri 1 Singkep per 31 Desember 2025 terdiri dari:

a. Kas di Bendahara BLUD

Kas BLUD adalah semua bentuk penerimaan dan pengeluaran uang tunai atau setara kas yang dikelola oleh SMK Negeri 1 Singkep dalam rangka menjalankan operasionalnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, dan pendapatan lainnya. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp.6,012,035.00 dengan rincian :

Uraian	Jumlah
Kas di Bank BRK	6,012,035.00
Kas Tunai	0
Total Kas di Bendahara BLUD	6,012,035.00

b. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan kas dibawah pengelolaan bendahara BOS yang bersumber dari pemerintah untuk mendukung operasional sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan tanpa membebani peserta didik. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp.33,061,337.00 dengan rincian :

Uraian	Jumlah
Kas di Bank	33,061,337.00
Kas Tunai	0
Total Kas di Bendahara BOS	33,061,337.00

c. Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan kas dibawah yang bersumber dari pemerintah untuk mendukung operasional sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan tanpa membebani peserta didik. Pada tahun 2025 saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp.16,792,000.00 dengan rincian :

Uraian	Jumlah
Kas Lainnya	16.792.000,00
Kas Tunai	0
Total Kas di Bendahara BOS	16.792.000,00

d. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 terdiri dari :

Uraian	Jumlah
Persediaan Barang Habis Pakai	0
- Bahan	0
- Suku Cadang	0
Persediaan BarangTidak Habis Pakai	0
Total Persediaan	0

2. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh pelayanan umum. Aset tetap sebesar Rp 5,959,425,676.12 per 31 Desember 2025 merupakan nilai perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan yang pengadaannya bersumber dari pengelolaan dana BOS dan dana SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dan BLUD.

a. Tanah

Nilai aset tanah BLUD SMK Negeri 1 Singkep per 31 Desember 2025 sebesar Rp 403,897,000.00 dan tidak terdapat penambahan aset tetap tanah selama tahun 2025.

b. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin BLUD SMK Negeri 1 Singkep per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1,930,598,997.60 Tetap sebesar Rp 1,930,598,997.60 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp 0.00, Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**Rp 1,930,598,997.60**
Penambahan :	
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 0
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0
- Reklasifikasi dari Aset Tetap xxxxx	Rp 0
- Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kementerian xxx.....Dst	Rp 0
Total Penambahan	**Rp 0**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel...Dst	
Total Pengurangan :	**Rp 0**
Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin	**Rp 1,930,598,997.60**

c. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan BLUD SMK Negeri 1 Singkep per 31 Desember 2025 sebesar Rp 3,513,392,000.00 tetap sebesar Rp 3,513,392,000.00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp 0.00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**Rp 3,513,392,000.00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 0
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0
- Reklasifikasi dari Aset Tetap xxxxx	Rp 0
- Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kementerian xxx.....Dst	Rp 0
Total Penambahan	**Rp 0**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel...Dst	
Total Pengurangan :	**Rp 0**
Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan	**Rp 3,513,392,000.00**

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD SMK Negeri 1 Singkep per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 tetap sebesar Rp 0,00

jika dibandingkan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp 0.00, Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**Rp 0**
Penambahan :	
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 0
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp 0
- Hibah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kementerian	Rp 0
Total Penambahan	**Rp 0**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	
Total Pengurangan :	**Rp 0**
Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	**Rp 0**

e. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Aset Tetap Lainnya BLUD SMK Negeri 1 Singkep per 31 Desember 2025 sebesar Rp398,817,400.00 tetap sebesar Rp398,817,400.00 jika dibandingkan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp 0 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	**Rp 398,817,400.00**
Penambahan :	
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 0
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp 0
- Hibah Aset Tetap Lainnya dari Kementerian	Rp 0
Total Penambahan	**Rp 0**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Tetap Lainnya	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	
Total Pengurangan :	**Rp 0**
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya	**Rp 398,817,400.00**

3. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya dapat berupa Aset Tidak Berwujud dan Aset Rusak Berat/Tidak Digunakan Lagi dalam Operasional Kegiatan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Singkep mencatat Aset Lainnya sebesar Rp193,892,440.00 terdiri dari Aset Tidak Berwujud (Software, dll) sebesar Rp0,00 dan Aset Rusak Berat/Tidak Digunakan Lagi dalam Operasional Kegiatan sebesar Rp0,00. Adapun mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Aset Lainnya	**Rp 193,892,440.00**

Uraian	Jumlah
Penambahan :	
- Aset Lainnya	Rp 0
- Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	Rp 0
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp 0
- Hibah Aset Lainnya dari Kementerian	Rp 0
Total Penambahan	**Rp 0**
Pengurangan :	
Penghapusan Aset Lainnya	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	
Total Pengurangan :	**Rp 0**
Saldo Akhir Aset Lainnya	**Rp 193,892.440.00**

4. Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Singkep memiliki kewajiban jangka pendek merupakan Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat sebesar Rp 16.792.000,00.

5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD SMK Negeri 1 Singkep pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pada Tahun 2025 Ekuitas adalah sebesar Rp 6.192,391,488.12

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Ekuitas	**Rp 6,192,391,488.12**
- Surplus/Defisit LO	Rp 0
- Koreksi Ekuitas	Rp 16.792.000,00
Saldo Ekuitas Akhir	**Rp 6,209,183,488.12**

5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional
b) Beban dari kegiatan operasional
c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
d) Pos luar biasa
e) Surplus/defisit LO

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional

Pendapatan LO dari kegiatan operasional terdiri dari :

i) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2025 sebesar Rp 0,00 sama dari Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan TEFA Otomotif	**0,00**	**0**	**0 %**	**sama**
Pendapatan TEFA DKV	**0,00**	**0**	**0 %**	**sama**
Pendapatan TEFA TKJ	0,00	0	0 %	sama
Pendapatan TEFA Layanan Perbankan	0,00			sama
Total Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO	0,00	0	0 %	sama

ii) Pendapatan BLUD dari Hibah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 sama dari pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2024 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Hibah SPP	0	0	0%	sama
Hibah Kementerian	0	0	0%	sama
Total Pendapatan BLUD dari Hibah LO	**0**	**0**	**0%**	**sama**

iii) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO Tahun 2025 sebesar Rp6,012,035.00 lebih tinggi dari pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Usaha Lainnya sebesar Rp12,035.00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Kantin	6,000,000.00	0	100%	6,000,000.00
Pendapatan Usaha Lainnya	12,035.00	0	100%	12,035.00
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO	**6,012,035.00**	**0**	**100%**	**6,012,035.00**

iv) Pendapatan BLUD dari APBD/APBN LO

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD LO Tahun 2025 sebesar Rp715,147,309.0000 lebih tinggi dari pendapatan BLUD dari APBD LO 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Dana BOSP	**715,147,309.00**	**0**	**100%**	**715,147,309.00**
Dana BOSDA	**0**	**0**	**0%**	
Total Pendapatan BLUD dari APBD LO	**715,147,309.00**	0	0%	**715,147,309.00**

v) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2025 sebesar Rp12,035.00 lebih tinggi dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan Usaha Lainnya	12,035.00	0	0%	12,035.00
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah LO	**12,035.00**	**0**	**0%**	**12,035.00**

b) Beban dari kegiatan operasional

1. Belanja Pegawai BLUD LO

Berupa Beban Gaji & Tunjangan dan Beban Tambahan Penghasilan BLUD LO dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp0,00 lebih sama dari beban pegawai BLUD LO tahun 2024 yang sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Gaji dan Tunjangan	0	0	0%	
Beban Tambahan Penghasilan	0	0	0%	
Total Beban Pegawai BLUD	**0**	**0**	**0%**	

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Beban barang dan jasa LO tahun 2025 terealisasi sebesar Rp430,481,863.00 lebih tinggi dari dari Beban barang dan jasa LO tahun 2024 yang sebesar Rp.0.00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan
Pembayaran Barang dan Jasa	242,091,285.00	0	0%	242,091,285.00
Pembayaran Pemeliharaan	0	0	0%	0
Pembayaran langganan Daya dan Jasa	62,957,078.00	0	0%	62,957,078.00
Pembayaran Perjalanan Dinas	125,433,500.00	0	0%	125,433,500.00
Total Beban Barang dan Jasa BLUD	**430,481,863.00**	**0**	**0%**	**430,481,863.00**

c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan dikelompokkan dalam kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional BLUD SMK Negeri 1 Singkep tahun 2025 sebesar Rp0,00.

d) Surplus/defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan beban. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Singkep mencatat surplus/Defisit LO sebesar
Rp0,00.

5.5 Laporan Arus Kas

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi BLUD SMK Negeri 1 Singkep dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi BLUD SMK Negeri 1 Singkep pada Tahun 2025 sebesar Rp 721,159,285.00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0	0
Pendapatan BLUD dari Hibah	0	0
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	6,000,000.00	0
Pendapatan BLUD dari APBD	715,147,309.00	0
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	12,035.00	0
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	**721,159,344.00**	**0**

b. Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi BLUD SMK Negeri 1 Singkep selama Tahun 2025 sebesar Rp242,091,285.0000 terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang dan Jasa	242,091,285.00	0
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	**242,091,285.00**	**0**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp6,000,000,00 Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	6,000,000.00	0

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset Non-Keuangan lainnya.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan di masa yang akan datang.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 1 singkep pada Tahun 2025 sebesar Rp0,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan Aset Tetap Tanah	0	0
Penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0	0
Penjualan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0	0
Penjualan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0
Penjualan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	0	0
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	**0**	**0**

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 1 Singkep pada Tahun 2025 sebesar Rp301,096,800.00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Belanja Modal Tanah	0,00	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	224,607,800.00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	76,489,000.00	0
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	**301,096,800.00**	**0**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp(301,096,800.00) Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(301,096,800.00)	0

3) Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Periode 2025

Kenaikan Kas Bersih Selama Periode Tahun 2025 merupakan akumulasi jumlah kenaikan kas bersih dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris.

Selama Tahun Anggaran 2025 terjadi kenaikan kas bersih sebesar Rp55,865,372.00 yang terdiri dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp0,00 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp0,00. Perbandingan Kenaikan Kas Bersih tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kenaikan Kas Bersih	55,865,372.00	0

4) Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025

Saldo akhir kas per 31 Desember 2025 merupakan perhitungan Saldo Awal per 1 Januari 2025 ditambah (dikurangi) dengan kenaikan/ (penurunan) kas bersih selama periode tahun 2025.

Saldo akhir kas di BLUD SMK Negeri 1 Singkep per 31 Desember 2025 sebesar Rp55,865,372.00 didapat dari perhitungan saldo awal Tahun 2025 sebesar Rp0,00 ditambah kenaikan/penurunan kas bersih selama periode tahun 2025 sebesar Rp Rp55,865,372.00

Total Saldo Kas BLUD SMK Negeri 1 Singkep Per 31 Desember 2025 sebesar Rp55,865,372.00 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas di BLUD	6,012,035.00	0
Kas Dana BOS	33,061,337.00	0
Kas Lainnya	16.792.000,00	0
Saldo Akhir Kas	**55,865,372.00**	**0**

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

a) Ekuitas awal
b) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti:
   1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
   2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas Akhir

a) Ekuitas Awal

Pada Tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Singkep mencatat ekuitas awal sebesar Rp Rp 6.192,391,488.12 yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada laporan Tahun 2025. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jumlah Aset Tahun 2025	Rp 6.192,391,488.12
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025	Rp 0,00
- **Saldo Awal Ekuitas 2025**	**Rp 6.192,391,488.12**

b) Surplus/Defisit LO

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dalam Laporan Operasional Tahun 2025 tercatat sebesar Rp(31,998.040.48)

c) Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar Rp 6.209.183.488,12 merupakan saldo kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Total Aset sebesar Rp 6.192,391,488.12 dan Total Kewajiban sebesar Rp 16.792.000,00 BLUD SMK Negeri 1 Singkep Tahun 2025.

- Jumlah Aset Tahun 2025	Rp 6.192,391,488.12
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025	Rp 16.792.000,00
- **Saldo Awal Ekuitas 2025**	**Rp 6.209.183.488,12**

6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

BLUD SMK Negeri 1 Singkep dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 1407 TAHUN 2024

BLUD SMK Negeri 1 Singep beralamat di Jl. Gergas Desa Batu Berdaun Kec. Singkep Kode Pos 29871 Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

BLUD SMK Negeri 1 Singkep adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nirlaba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di , dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra BLUD SMK Negeri 1 Singkep , sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala BLUD SMK Negeri 1 Singkep

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Singkep Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun sebagai bentuk tanggung jawab BLUD SMK Negeri 1 Singkep dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, penyusunan laporan keuangan BLUD juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Secara umum pencapaian kinerja atas sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik, namun begitu masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang masih harus terus dibenahi dan menjadi perhatian oleh BLUD SMK Negeri 1 Singkep

Dengan memperhatikan strategisnya peran sekolah dan besarnya tantangan yang dihadapi untuk mendukung Visi Misi Pendidikan Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, SMK Negeri 1 Singkep Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja serta memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan industri. Melalui pendekatan berbasis kompetensi, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta pengelolaan keuangan yang transparan melalui sistem BLUD, sekolah ini berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan lulusan SMK dapat menjadi tenaga kerja yang unggul dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Akhir kata, BLUD SMK Negeri 1 Singkep Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan dalam penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban kami dalam menyajikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

Lingga, 25 Mei 2026

PIMPINAN BLUD SMK N 1 SINGKEP
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMK NEGERI 1 SINGKEP
DINAS PENDIDIKAN

ZUSMAR ERFYN TULUS, S.Pi.
Penata Tk. I/IIId
NIP. 196903062006041011

LAPORAN
KEUANGAN
(Audited)

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SMK NEGERI 1 BUNGURAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2025



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri Bunguran Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kami berharap dengan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) di Provinsi Kepulauan Riau.

Kepulauan Riau, 25 Mei 2026

Pimpinan BLUD
SMK NEGERI 1 BUNGURAN BARAT



Kasyifal Ghammi Thaib, S.Kom
NIP. 198102182009031004

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan SMK Negeri 1 BUNGURAN BARAT Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari

(i) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (iii) Neraca; (iv) Laporan Operasional (LO); (v) Laporan Arus Kas (LAK); (vi) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (vii) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kepulauan Riau, 25 Mei 2026

Pimpinan BLUD
SMK NEGERI 1 BUNGURAN BARAT



Kasyifal Ghammi Thaib, S.Kom
NIP. 198102182009031004

A.LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMK NEGERI 1 BUNGURAN BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

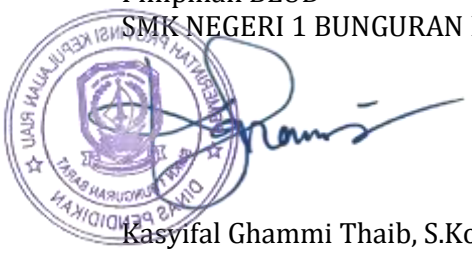
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	REALISASI BLUD 2025	%	REALISASI BLUD 2024
1	2	3	4	5	6
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.945.036.000,00**	**259.008.879,00**	**13,32**	**0,00**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.687.636.000,00**	**1.608.879,00**	**0,10**	**0,00**
4.1.04.	**Lain-lain PAD yang Sah**	**1.687.636.000,00**	**1.608.879,00**	**0,10**	**0,00**
4.1.04.05.	**Jasa Giro**	**0,00**	**28.839,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
4.1.04.05.02.	**Jasa Giro pada Kas di Bendahara**	**0,00**	**28.839,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
4.1.04.05.02.0001.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	28.839,00	**#DIV/0!**	0,00
4.1.04.16.	**Pendapatan BLUD**	**1.687.636.000,00**	**1.580.040,00**	**0,09**	**0,00**
4.1.04.16.02.	**Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan**	**11.500.000,00**	**1.180.000,00**	**10,26**	**0,00**
4.1.04.16.02.0001.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	11.500.000,00	1.180.000,00	**10,26**	0,00
4.1.04.16.03.	**Pendapatan BLUD dari Hibah**	**1.675.636.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.04.16.03.0001.	Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat	1.675.636.000,00	0,00	**0,00**	0,00
4.1.04.16.04.	**Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain**	**500.000,00**	**400.000,00**	**80,00**	**0,00**
4.1.04.16.04.0001.	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	500.000,00	400.000,00	**80,00**	0,00
4.1.04.16.06.	**Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah**	**0,00**	**40,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
4.1.04.16.06.0001.	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	0,00	40,00	**#DIV/0!**	0,00
4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**257.400.000,00**	**257.400.000,00**	**100,00**	**0,00**
4.2.01.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**257.400.000,00**	**257.400.000,00**	**100,00**	**0,00**
4.2.01.01.	**Dana Perimbangan**	**257.400.000,00**	**257.400.000,00**	**100,00**	**0,00**
4.2.01.01.04.	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**	**257.400.000,00**	**257.400.000,00**	**100,00**	**0,00**
4.2.01.01.04.0001.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	257.400.000,00	257.400.000,00	**100,00**	0,00
5.	**BELANJA DAERAH**	**1.945.036.000,00**	**257.400.000,00**	**13,23**	**0,00**
5.1.	**BELANJA OPERASI**	**169.920.000,00**	**157.920.000,00**	**92,94**	**0,00**
5.1.02.	**Belanja Barang dan Jasa**	**169.920.000,00**	**157.920.000,00**	**92,94**	**0,00**
5.1.02.01.	**Belanja Barang**	**87.356.200,00**	**88.731.965,00**	**101,57**	**0,00**
5.1.02.01.01.	**Belanja Barang Pakai Habis**	**79.231.200,00**	**80.606.965,00**	**101,74**	**0,00**
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.000.000,00	2.280.000,00	**76,00**	0,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.600.000,00	3.240.000,00	**124,62**	0,00
5.1.02.01.01.0011.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	24.000.000,00	24.000.000,00	**100,00**	0,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.600.000,00	2.250.000,00	**48,91**	0,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.560.400,00	23.391.965,00	**79,13**	0,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.540.800,00	1.600.000,00	**28,88**	0,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	130.000,00	350.000,00	**269,23**	0,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	800.000,00	**#DIV/0!**	0,00

5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.800.000,00	13.095.000,00	**272,81**	0,00
5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	8.100.000,00	**#DIV/0!**	0,00
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.000.000,00	1.500.000,00	**50,00**	0,00
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	2.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00
5.1.02.01.02.	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**	**8.125.000,00**	**8.125.000,00**	**100,00**	**0,00**
5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	8.125.000,00	8.125.000,00	**100,00**	0,00
5.1.02.02.	**Belanja Jasa**	**15.600.000,00**	**11.050.000,00**	**70,83**	**0,00**
5.1.02.02.01.	**Belanja Jasa Kantor**	**8.600.000,00**	**2.850.000,00**	**33,14**	**0,00**
5.1.02.02.01.0009.	Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	1.500.000,00	**#DIV/0!**	0,00
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.600.000,00	1.350.000,00	**51,92**	0,00
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	6.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00
5.1.02.02.04.	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100,00**	**0,00**
5.1.02.02.04.0317.	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	5.000.000,00	5.000.000,00	**100,00**	0,00
5.1.02.02.05.	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**	**2.000.000,00**	**3.200.000,00**	**160,00**	**0,00**
5.1.02.02.05.0011.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.000.000,00	3.200.000,00	**160,00**	0,00
5.1.02.03.	**Belanja Pemeliharaan**	**14.920.000,00**	**12.320.000,00**	**82,57**	**0,00**
5.1.02.03.02.	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**8.520.000,00**	**7.120.000,00**	**83,57**	**0,00**
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00
5.1.02.03.02.0120.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	6.520.000,00	7.120.000,00	**109,20**	0,00
5.1.02.03.03.	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**2.000.000,00**	**800.000,00**	**40,00**	**0,00**
5.1.02.03.03.0005.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	2.000.000,00	800.000,00	**40,00**	0,00
5.1.02.03.05.	**Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**100,00**	**0,00**
5.1.02.03.05.0001.	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	4.400.000,00	4.400.000,00	**100,00**	0,00
5.1.02.04.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**52.043.800,00**	**45.818.035,00**	**88,04**	**0,00**
5.1.02.04.01.	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**52.043.800,00**	**45.818.035,00**	**88,04**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.393.800,00	37.751.035,00	**106,66**	0,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.650.000,00	8.067.000,00	**48,45**	0,00
5.2.	**BELANJA MODAL**	**1.775.116.000,00**	**99.480.000,00**	**5,60**	**0,00**
5.2.02.	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**185.500.000,00**	**77.900.000,00**	**41,99**	**0,00**
5.2.02.05.	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**163.100.000,00**	**60.800.000,00**	**37,28**	**0,00**
5.2.02.05.01.	**Belanja Modal Alat Kantor**	**34.000.000,00**	**38.500.000,00**	**113,24**	**0,00**
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	34.000.000,00	38.500.000,00	**113,24**	0,00
5.2.02.05.02.	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**	**129.100.000,00**	**22.300.000,00**	**17,27**	**0,00**
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	107.600.000,00	0,00	**0,00**	0,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	19.500.000,00	19.500.000,00	**100,00**	0,00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	2.800.000,00	**140,00**	0,00
5.2.02.08.	**Belanja Modal Alat Laboratorium**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**100,00**	**0,00**
5.2.02.08.03.	**Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**100,00**	**0,00**

5.2.02.08.03.0010.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	2.100.000,00	2.100.000,00	**100,00**	0,00
5.2.02.10.	**Belanja Modal Komputer**	**20.300.000,00**	**15.000.000,00**	**73,89**	**0,00**
5.2.02.10.02.	**Belanja Modal Peralatan Komputer**	**20.300.000,00**	**15.000.000,00**	**73,89**	**0,00**
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	20.300.000,00	15.000.000,00	**73,89**	0,00
5.2.03.	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**1.568.036.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.03.01.	**Belanja Modal Bangunan Gedung**	**1.568.036.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.03.01.01.	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**	**1.568.036.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.568.036.000,00	0,00	**0,00**	0,00
5.2.05.	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	**21.580.000,00**	**21.580.000,00**	**100,00**	**0,00**
5.2.05.01.	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan**	**21.580.000,00**	**21.580.000,00**	**100,00**	**0,00**
5.2.05.01.01.	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak**	**21.580.000,00**	**21.580.000,00**	**100,00**	**0,00**
5.2.05.01.01.0005.	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	8.250.000,00	8.250.000,00	**100,00**	0,00
5.2.05.01.01.0006.	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	3.080.000,00	3.080.000,00	**100,00**	0,00
5.2.05.01.01.0007.	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	10.250.000,00	10.250.000,00	**100,00**	0,00
	SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM PEMBIAYAAN	**0,00**	**1.608.879,00**	**0,08**	**0,00**

Kepulauan Riau, 25 Mei 2026

Pimpinan BLUD
SMK NEGERI 1 BUNGURAN BARAT



Kasyifal Ghammi Thaib, S.Kom
NIP. 198102182009031004

A. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMK NEGERI 1 BUNGURAN BARAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	**7.5.2.1**	0,00	0,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**7.5.2.2**	0,00	0,00
3	Subtotal (1-2)		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	**7.5.2.3**	0,00	0,00
5	Subtotal (3+4)		0,00	0,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	**7.5.2.6**	0,00	0,00

Kepulauan Riau, 25 Mei 2026

Pimpinan BLUD
SMK NEGERI 1 BUNGURAN BARAT

Kasyifal Ghammi Thaib, S.Kom
NIP. 198102182009031004

B. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SMK NEGERI 1 BUNGURAN BARAT

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	REFF	2025	2024
2	3	4	5
ASET		**7,736,142,555.85**	**0.00**
ASET LANCAR		**1,580,040.00**	**0.00**
Kas dan Setara Kas		**1,580,040.00**	**0.00**
Kas di BLUD		**1,580,040.00**	**0.00**
Kas di BLUD		**1,580,040.00**	**0.00**
Kas di BLUD		1,580,040.00	0.00
Kas Lainnya		**28.839,00**	
Kas Lainnya		**28.839,00**	
Kas Lainnya		28.839,00	
Persediaan		**0.00**	**0.00**
Barang Pakai Habis		**0.00**	**0.00**
Bahan		**0.00**	**0.00**
Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi		0.00	0.00
Persediaan Bahan Kimia		0.00	0.00
Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas		0.00	0.00
Persediaan Bahan Baku		0.00	0.00
Persediaan Bahan Makanan Pokok		0.00	0.00
Persediaan Bahan/Bibit Tanaman		0.00	0.00
Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran		0.00	0.00
Persediaan Isi Tabung Gas		0.00	0.00
Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan		0.00	0.00
Persediaan Bahan Lainnya		0.00	0.00
Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran		0.00	0.00
Suku Cadang		**0.00**	**0.00**
Suku Cadang Alat Kedokteran		0.00	0.00
Suku Cadang Alat Bengkel		0.00	0.00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		**0.00**	**0.00**
Persediaan Alat Tulis Kantor		0.00	0.00
Persediaan Kertas dan Cover		0.00	0.00
Persediaan Bahan Cetak		0.00	0.00
Persediaan Benda Pos		0.00	0.00

Persediaan Dokumen/Administrasi Tender		0.00	0.00
Persediaan Bahan Komputer		0.00	0.00
Persediaan Perabot Kantor		0.00	0.00
Persediaan Alat Listrik		0.00	0.00
Persediaan Perlengkapan Dinas		0.00	0.00
Perlengkapan Pendukung Olahraga		0.00	0.00
Suvenir/Cendera Mata		0.00	0.00
Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainny		0.00	0.00
Obat-obatan		**0.00**	**0.00**
2	3	4	5
Persediaan Obat		0.00	0.00
Persediaan Obat-obatan Lainnya		0.00	0.00
Natura dan Pakan		**0.00**	**0.00**
Natura		0.00	0.00
Pakan		0.00	0.00
Natura dan Pakan Lainnya		0.00	0.00
Jumlah ASET LANCAR		**1.608.879,00**	**0.00**
ASET TETAP		**7,734,562,515.85**	**0.00**
Tanah		**1,449,000,000.00**	**0.00**
Tanah		**1,449,000,000.00**	**0.00**
Tanah Persil		**1,449,000,000.00**	**0.00**
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja		1,449,000,000.00	0.00
Peralatan dan Mesin		**847,666,253.00**	**0.00**
Alat Kantor dan Rumah Tangga		**830,566,253.00**	**0.00**
Alat Kantor		**700,666,253.00**	**0.00**
Alat Kantor Lainnya		700,666,253.00	0.00
Alat Rumah Tangga		**129,900,000.00**	**0.00**
Mebel		107,600,000.00	0.00
Alat Pendingin		19,500,000.00	0.00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		2,800,000.00	0.00
Alat Laboratorium		**2,100,000.00**	**0.00**
Alat Peraga Praktik Sekolah		**2,100,000.00**	**0.00**
Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian		2,100,000.00	0.00
Komputer		**15,000,000.00**	**0.00**
Peralatan Komputer		**15,000,000.00**	**0.00**
Peralatan Komputer Lainnya		15,000,000.00	0.00
Gedung dan Bangunan		**3,478,876,000.00**	**0.00**
Bangunan Gedung		**3,478,876,000.00**	**0.00**
Bangunan Gedung Tempat Kerja		**3,478,876,000.00**	**0.00**
Bangunan Gedung Kantor		3,478,876,000.00	0.00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi		**273,800,000.00**	**0.00**

Jalan dan Jembatan		**273,800,000.00**	**0.00**
Jalan		**273,800,000.00**	**0.00**
Jalan Nasional		273,800,000.00	0.00
Aset Tetap Lainnya		**1,776,326,600.00**	**0.00**
Bahan Perpustakaan		**1,776,326,600.00**	**0.00**
Bahan Perpustakaan Tercetak		**1,776,326,600.00**	**0.00**
Buku Umum		1,754,746,600.00	0.00
Buku Ilmu Bahasa		8,250,000.00	0.00
Buku Matematika dan Pengetahuan Alam		3,080,000.00	0.00
Buku Ilmu Pengetahuan Praktis		10,250,000.00	0.00
Akumulasi Penyusutan		**(91,106,337.15)**	**0.00**
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		**(91,106,337.15)**	**0.00**
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung		**(91,106,337.15)**	**0.00**
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan		(91,106,337.15)	0.00
Jumlah ASET TETAP		**7,734,562,515.85**	**0.00**
JUMLAH ASET		**7,736,142,555.85**	**0.00**
EKUITAS		**7,736,142,555.85**	**0.00**
2	3	4	5
EKUITAS		**7,736,142,555.85**	**0.00**
Ekuitas		**7,736,142,555.85**	**0.00**
Ekuitas		**7,736,142,555.85**	**0.00**
Ekuitas		**7,736,142,555.85**	**0.00**
Ekuitas		7,736,142,555.85	0.00
Jumlah EKUITAS		**7,736,142,555.85**	**0.00**
JUMLAH EKUITAS		**7,736,142,555.85**	**0.00**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**7,736,142,555.85**	**0.00**

Kepulauan Riau, 25 Mei 2026

Pimpinan BLUD
SMK NEGERI 1 BUNGURAN BARAT

Kasyifal Ghammi Thaib, S.Kom
NIP. 198102182009031004

C. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMK NEGERI 1 BUNGURAN BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	%
2	3	4	5	6
PENDAPATAN - LO	**1,934,616,040.00**	**0.00**	**1,934,616,040.00**	**100.00**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**1,677,216,040.00**	**0.00**	**1,677,216,040.00**	**100.00**
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	**1,677,216,040.00**	**0.00**	**1,677,216,040.00**	**100.00**
Pendapatan dari BLUD-LO	**1,677,216,040.00**	**0.00**	**1,677,216,040.00**	**100.00**
Pendapatan dari BLUD-LO	**40.00**	**0.00**	**40.00**	**100.00**
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	100.00
Pendapatan dari BLUD-LO	**40.00**	**0.00**	**40.00**	**100.00**
Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat-LO	1,675,636,000.00	0.00	1,675,636,000.00	100.00
Pendapatan dari BLUD-LO	**40.00**	**0.00**	**40.00**	**100.00**
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00
Pendapatan dari BLUD-LO	**40.00**	**0.00**	**40.00**	**100.00**
Pendapatan BLUD dari Jasa Giro-LO	40.00	0.00	40.00	100.00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**1,677,216,040.00**	**0.00**	**1,677,216,040.00**	**100.00**
DAK Non Fisik	**257,400,000.00**	**0.00**	**257,400,000.00**	**100.00**
DAK Non Fisik	**257,400,000.00**	**0.00**	**257,400,000.00**	**100.00**
DAK Non Fisik	**257,400,000.00**	**0.00**	**257,400,000.00**	**100.00**
DAK Non Fisik	**257,400,000.00**	**0.00**	**257,400,000.00**	**100.00**
DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	257,400,000.00	0.00	257,400,000.00	100.00
Jumlah DAK Non Fisik	**257,400,000.00**	**0.00**	**257,400,000.00**	**100.00**
JUMLAH PENDAPATAN - LO	**1,934,616,040.00**	**0.00**	**1,934,616,040.00**	**100.00**
BEBAN DAERAH	**1,759,872,399.15**	**0.00**	**1,759,872,399.15**	**100.00**
BEBAN OPERASI	**1,759,872,399.15**	**0.00**	**1,759,872,399.15**	**100.00**
Beban Barang dan Jasa	**1,668,766,062.00**	**0.00**	**1,668,766,062.00**	**100.00**
Beban Barang	**1,599,578,027.00**	**0.00**	**1,599,578,027.00**	**100.00**
Beban Barang	**1,510,846,062.00**	**0.00**	**1,510,846,062.00**	**100.00**
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	100.00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	100.00

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23,391,965.00	0.00	23,391,965.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	350,000.00	0.00	350,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	800,000.00	0.00	800,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	13,095,000.00	0.00	13,095,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00	100.00
Beban Obat-Obatan-Obat	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00
Beban Barang	**1,510,846,062.00**	**0.00**	**1,510,846,062.00**	**100.00**
Beban Komponen-Komponen Peralatan	8,125,000.00	0.00	8,125,000.00	100.00
Beban Barang	**1,510,846,062.00**	**0.00**	**1,510,846,062.00**	**100.00**
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1,510,846,062.00	0.00	1,510,846,062.00	100.00
Beban Jasa	**11,050,000.00**	**0.00**	**11,050,000.00**	**100.00**
Beban Jasa	**3,200,000.00**	**0.00**	**3,200,000.00**	**100.00**
Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	100.00
Beban Jasa	**3,200,000.00**	**0.00**	**3,200,000.00**	**100.00**
Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100.00
Beban Jasa	**3,200,000.00**	**0.00**	**3,200,000.00**	**100.00**
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan	**12,320,000.00**	**0.00**	**12,320,000.00**	**100.00**
Beban Pemeliharaan	**4,400,000.00**	**0.00**	**4,400,000.00**	**100.00**
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	7,120,000.00	0.00	7,120,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan	**4,400,000.00**	**0.00**	**4,400,000.00**	**100.00**
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	800,000.00	0.00	800,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan	**4,400,000.00**	**0.00**	**4,400,000.00**	**100.00**
Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas	**45,818,035.00**	**0.00**	**45,818,035.00**	**100.00**
Beban Perjalanan Dinas	**45,818,035.00**	**0.00**	**45,818,035.00**	**100.00**
Beban Perjalanan Dinas Biasa	37,751,035.00	0.00	37,751,035.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,067,000.00	0.00	8,067,000.00	100.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	**91,106,337.15**	**0.00**	**91,106,337.15**	**100.00**
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	**91,106,337.15**	**0.00**	**91,106,337.15**	**100.00**
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	**91,106,337.15**	**0.00**	**91,106,337.15**	**100.00**
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	91,106,337.15	0.00	91,106,337.15	100.00

Jumlah BEBAN OPERASI	**1,759,872,399.15**	**0.00**	**1,759,872,399.15**	**100.00**
JUMLAH BEBAN DAERAH	**1,759,872,399.15**	**0.00**	**1,759,872,399.15**	**100.00**
SURPLUS/ DEFISIT	**174,743,640.85**	**0.00**	**174,743,640.85**	**100.00**

Kepulauan Riau, 25 Mei 2026

Pimpinan BLUD
SMK NEGERI 1 BUNGURAN BARAT



Kasyifal Ghammi Thaib, S.Kom
NIP. 198102182009031004

D. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMK NEGERI 1 BUNGURAN BARAT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	2025	2024
1	2	3	4
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	**Arus Masuk Kas**		
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	684.552.300,00	968.983.938,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	45.600.000,00	0,00
6	Pendapatan Hibah	1.026.187.000,00	1.610.865.000,00
7	Pendapatan APBN/APBD	3.841.610.000,00	3.827.870.000,00
8	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	6.155.488,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	5.604.104.788,00	6.407.718.938,00
9	**Arus Keluar Kas**		
10	Pembayaran Pegawai	0,00	0,00
11	Pembayaran Barang dan Jasa	1.879.485.874,23	4.518.848.897,47
12	Pembayaran Pemeliharaan	4.660.000,00	130.501.366,03
13	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	425.609.372,00	0,00
14	Pembayaran Perjalanan Dinas	392.683.601,00	470.000,00
15	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	2.702.438.847,23	4.649.820.263,50
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2.901.665.940,77	1.757.898.674,50
16	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
17	**Arus Masuk Kas**		
18	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
19	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
20	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
21	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
22	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
23	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
24	Penerimaan dari Divestasi	0,00	0,00
25	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
26	**Arus Keluar Kas**		

27	Perolehan Tanah	0,00	0,00
28	Perolehan Peralatan dan Mesin	1.456.583.167,00	1.531.956.220,84
29	Perolehan Gedung dan Bangunan	998.587.000,00	0,00
30	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	92.846.813,00
31	Perolehan Aset Tetap Lainnya	395.816.000,00	311.145.000,00
32	Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
33	Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00
34	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	2.850.986.167,00	1.935.948.033,84
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(2.850.986.167,00)	(1.935.948.033,84)
35	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**		
36	**Arus Masuk Kas**		
37	Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00
38	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
39	**Arus Keluar Kas**		
40	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00
41	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	0,00	0,00
42	Penyetoran ke Kas Negara	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
43	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**		
44	**Arus Masuk Kas**		
45	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
46	**Arus Keluar Kas**		
47	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
48	**Kenaikan/ Penurunan Kas BLU**	50.679.773,77	(178.049.359,34)
49	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLU**	634.996.295,23	813.045.654,57
50	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU**	685.676.069,00	634.996.295,23

Kepulauan Riau, 25 Mei 2026
Pimpinan BLUD
SMK NEGERI 1 BUNGURAN BARAT



Kasyifal Ghammi Thaib, S.Kom
NIP. 198102182009031004

E. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SMK NEGERI 1 BUNGURAN BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Ekuitas Awal		12.052.044.392,21	11.613.311.984,57
2	Surplus/Defisit-LO		1.515.907.470,21	438.732.407,64
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		0,00	0,00
4	Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
6	Lain-lain		0,00	0,00
7	Ekuitas Akhir		**13.567.951.862,42**	**12.052.044.392,21**

Kepulauan Riau, 25 Mei 2026

Pimpinan BLUD
SMK NEGERI 1 BUNGURAN BARAT

Kasyifal Ghammi Thaib, S.Kom
NIP. 198102182009031004

BAB I PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan BLUD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran ;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan BLUD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala BLUD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk

memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan BLUD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

.

1.1 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SMK Negeri 1 Bunguran Barat Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan RiauTahun 2024.
17. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat Tahun 2025, adalah tanggungjawab sepenuhnya BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat, dalam hal ini adalah Pimpinan BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat.

1.4 Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (*Subsequent Event*) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat tahun 2026. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2026.

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 2 Batam adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.3 Penanggungjawab Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat
1.4 Periode Pelaporan Keuangan
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Profil BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat

2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat

2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat tahun 2025

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025
3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2 Asumsi dasar Laporan Keuangan
4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan
4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja
4.7 Kebijakan Akuntansi Kas
4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan
4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

5.1 Laporan Realisasi Anggaran
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3 Neraca
5.4 Laporan Operasional
5.5 Laporan Arus Kas
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
5.7 Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan atas informasi – Informasi non Keuangan

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

Bab VII Penutup

BAB II

PROFIL BLUD SMK NEGERI 1 BUNGURAN BARAT

2.1 Sumber Daya BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat

Profil dan Kebijakan Teknis

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Bunguran Barat adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMK di Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dengan SK Penegerian : Tanggal 15-Januari-2007 No 18 Tahun 2007 yang terletak di kawasan Pulau Natuna, Laut Cina Selatan.

BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten serta tenaga ahli yang mendukung pelaksanaan *Teaching Factory (TEFA)*. SDM yang tersedia meliputi:

1. Tenaga Pendidik (Guru Produktif dan Normatif):
   - Guru bersertifikasi keahlian industri sesuai bidang kompetensi.
   - Guru mata pelajaran umum yang mendukung kurikulum berbasis kompetensi.
   - Instruktur dari dunia industri yang terlibat dalam program pelatihan siswa.
2. Tenaga Kependidikan:
   - Staf administrasi yang mengelola keuangan dan operasional BLUD.
   - Teknisi laboratorium dan bengkel untuk mendukung kegiatan praktik.
   - Tenaga keamanan dan kebersihan untuk menjaga lingkungan sekolah yang kondusif.
3. Kemitraan dengan Industri:
   - Mengundang praktisi industri sebagai instruktur tamu.
   - Menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk program magang dan penyerapan tenaga kerja.
   - Mengembangkan skema sertifikasi kompetensi yang diakui dunia usaha dan industri.

Sebagai SMK BLUD yang berbasis *Teaching Factory* (TEFA), sekolah telah memiliki berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran berbasis produksi dan layanan industri, di antaranya:

1. Ruang Kelas dan Laboratorium:
   - Ruang kelas berbasis IT untuk pembelajaran teori.
   - Laboratorium komputer untuk pembelajaran informatika.
   - Perpustakaan sebagai pusat referensi dan literasi siswa.
2. Workshop dan Bengkel TEFA:

1. Akuntansi (Akuntansi dan Keuangan Lembaga)

Di sini suasananya biasanya tenang dan penuh konsentrasi. Fokus utamanya adalah ketelitian angka.

- **Mengelola Jurnal & Buku Besar:** Mencatat transaksi keuangan secara manual maupun digital.
- **Komputer Akuntansi:** Mengoperasikan *software* seperti MYOB, Accurate, atau spreadsheet (Excel) tingkat lanjut.
- **Administrasi Pajak:** Belajar menghitung dan mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak).
- **Simulasi Bank Mini:** Praktik menjadi *teller* atau *customer service* perbankan.

2. Perkantoran (Manajemen Perkantoran & Layanan Bisnis)

Ruang ini biasanya disulap jadi miniatur kantor perusahaan besar.

- **Korespondensi:** Mengetik surat-surat bisnis dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.
- **Kearsipan (Filing):** Mengelola dokumen dengan sistem abjad, kronologis, atau wilayah agar mudah dicari.
- **Simulasi Rapat & Protokoler:** Praktik menjadi notulis, pembawa acara (MC), atau sekretaris yang mengatur jadwal pimpinan.
- **Layanan Telepon:** Praktik menerima telepon masuk dengan etika *grooming* dan komunikasi yang profesional.

3. TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan)

Lab ini biasanya penuh dengan kabel, router, dan perangkat keras lainnya.

- **Rakitan Komputer:** Bongkar pasang PC dan instalasi sistem operasi (Windows/Linux).
- **Konfigurasi Jaringan:** *Setting* Router Mikrotik, Switch, dan Access Point agar internet bisa jalan.
- **Crimp Kabel:** Memotong dan menyambung kabel LAN (RJ45).
- **Server Administration:** Membangun dan mengelola server untuk kebutuhan data berskala kecil hingga besar.

4. DKV (Desain Komunikasi Visual)

Ruang paling estetik yang isinya penuh dengan karya seni dan komputer spek tinggi.

- **Desain Grafis:** Membuat logo, poster, dan katalog menggunakan Adobe Illustrator atau Photoshop.
- **Ilustrasi & Digital Painting:** Menggambar menggunakan *pen tablet* atau manual di atas kertas.
- **Fotografi & Videografi:** Praktik memotret produk di dalam studio mini atau mengedit video sinematik.
- **Sablon & Packaging:** Kadang mereka juga praktik mencetak desain ke kaos atau membuat prototipe kemasan produk.

5. APHPI (Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan)

Lab ini lebih mirip dapur industri yang sangat menjaga kebersihan (higiene).

- **Pengolahan Ikan:** Membuat produk turunan ikan seperti nugget, bakso ikan, abon, atau kerupuk kemplang.
- **Uji Mutu:** Mengecek kesegaran ikan di laboratorium secara kimiawi atau organoleptik (sensori).
- **Pengemasan & Pengalengan:** Belajar teknik pengemasan kedap udara (vakum) agar produk awet tanpa bahan pengawet berbahaya.
- **Fermentasi:** Praktik membuat kecap ikan atau terasi.

3. Fasilitas Pendukung:
    - Mini MARKET Panglima Hujan SMKN 1 BUNGURAN BARAT.
    - BANK MINI PANGLIMA HUJAN SMKN 1 BUNGURAN BARAT
    - Ruang Pengolahan produk hasil Teaching Factory.
    - Area publik seperti kantin sekolah yang dikelola bersama sebagai bengkel pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan.

Sebagai BLUD, SMK memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan Teaching Factory. Sumber dana sekolah berasal dari:

1. Dana BOS dan APBD:
    - Digunakan untuk operasional sekolah, gaji guru, serta pengadaan bahan ajar dan alat praktik.
2. Pendapatan dari Unit Usaha TEFA:
    - Hasil penjualan produk dari unit Teaching Factory.
    - Jasa layanan seperti Pengolahan Pilet Ikan, Pembuatan baleho, Jasa Pengetikan dokumen.
    - Kerjasama dengan pihak lain berupa penyewaan lahan kantin, Speed Boat, kantin dan Drone DKV.
3. Bantuan dari Pemerintah dan Swasta:
    - Hibah atau bantuan dari pemerintah untuk pengembangan kurikulum dan fasilitas.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat

Data bisa diperoleh dari RENSTRA Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bunguran Barat tahun 2021-2026

2.3 Program dan Kegiatan BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat

Tabel Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat

No	Unit Teaching Factory (TEFA)	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Keterangan
1	**TEFA Akutansi**	Bank Mini	5.000.000	0	0	Belum berjalan
2	**TEFA Perkantoran**	Jasa penjualan Tiket dan pengetikan	1.000.000	0	0	Belum berjalan
3	**TEFA TKJ**	Service Komputer	2.000.000	0	0	Belum berjalan
4	**TEFA DKV**	Baleho, Photo dan Desain Gravis dan Video	5.000.000	1.180.000	23,6	Pendapatan dari jasa photo dan baleho
5	**TEFA APHPi**	Pengolahan Ikan dan Budidaya Ikan	10.000.000	0	0	Belum optimal

BAB III INDIKATOR DAN IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja pada BLUD SMK, pada laporan keuangan ini digunakan sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat managemen yang digunakan untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran dan tujuan, untuk mewujudkan misi dan visi organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut akan disajikan data kinerja BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Pencapaian Target BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
A. Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa					
1	Persentase kelulusan siswa	100%	100%	100%	100% siswa lulus
2	Rata-rata nilai Ujian Kompetensi Keahlian (UKK)	≥ 80	84,0	100%	Mencapai target
3	Persentase siswa yang memperoleh sertifikasi kompetensi industri	100%	100%	100%	Siswa lulus uji sertifikasi
4	Persentase lulusan yang bekerja sesuai kompetensi dalam 6 bulan	50%	40%	90%	Belum mencapai target, Karena banyak siswa yang melanjutkan
5	Persentase lulusan yang berwirausaha	10%	4%	6%	Siswa banyak yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
B. Kinerja Keuangan dan Unit Usaha BLUD					
6	Persentase pendapatan unit usaha BLUD terhadap biaya operasional sekolah	30%	25 %	90%	Pendapatan BLUD dari jasa layanan belum optimal
7	Efisiensi penggunaan dana	90%	0 %	0 %	Anggaran Cukup terserap dengan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
	BLUD sesuai rencana kerja				baik dan efektif
C. Kinerja Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)					
8	Jumlah kerja sama aktif dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	5 mitra	3 mitra	65%	Belum Tercapai
9	Persentase siswa yang menjalani magang industri	100%	100%	100%	Semua siswa telah menjalani magang
10	Jumlah produk atau jasa unggulan dari Teaching Factory (TEFA)	5 produk	4 produk	95%	Hampir Tercapai
D. Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan					
11	Kepuasan siswa dan orang tua terhadap layanan pendidikan	85%	85%	100%	Tercapai
12	Jumlah guru produktif bersertifikasi industri	75%	25%	25%	Sebagian kecil guru sudah sertifikasi

Berdasarkan tabel pencapaian, secara keseluruhan SMK BLUD telah mencapai rata-rata 73,41% dari target yang ditetapkan. Beberapa indikator bahkan mencapai target, seperti wirausaha lulusan, jumlah mitra industri, dan kepuasan siswa. Namun, ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, seperti pencapaian pendapat usaha BLUD dan jumlah guru bersertifikasi industri. Untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menjaga dan meningkatkan kemitraan dengan industri untuk meningkatkan jumlah lulusan yang bekerja sesuai kompetensi.
2. Optimalisasi pemasaran unit usaha BLUD untuk meningkatkan pendapatan sekolah.
3. Pengembangan produk Teaching Factory agar lebih kompetitif di pasar.
4. Memotivasi guru produktif untuk dapat menyelesaikan program sertifikasinya.

Dengan perbaikan strategi ini, diharapkan SMK BLUD dapat mencapai 98% target di tahun mendatang.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi

Adapun hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target realisasi antara lain :

b. Hambatan dalam Kinerja Akademik dan Kompetensi Siswa

1. Kurangnya kesiapan siswa dalam ujian sertifikasi industri
   - Tidak semua siswa memiliki kesiapan yang cukup untuk lulus uji sertifikasi.
   - Waktu Praktek kerja Lapangan (PKL) yang berdekatan dengan uji kompetensi keahlian mengakibatkan banyak siswa yang tidak maksimal dalam mengikutinya.

- Kurangnya motivasi belajar dan disiplin dari siswa tersebut.

2. Penyerapan lulusan ke dunia kerja belum optimal
   - Persaingan ketat di dunia kerja sehingga tidak semua lulusan langsung terserap.
   - Masih ada lulusan yang lebih memilih bekerja di luar bidang keahlian mereka.
   - Munculnya tren baru bagi lulusan yang cenderung berganti-ganti pekerjaan terkait dengan perbandingan *take home pay* yang didapat antar perusahaan sejenis.

b. Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan dan Unit Usaha BLUD

1. Pendapatan unit usaha BLUD belum mencapai target
   - Persaingan dengan produk atau jasa dari industri komersial yang lebih mapan.
   - Kurangnya strategi pemasaran dan branding produk/jasa SMK BLUD.
   - Kurangnya konstitensi dari hasil produksi sehingga mengakibatkan ekspansi dari pemasaran produk tidak optimal.
   - Kurang semangat dari pengelola TEFA terkait dengan insentif tambahan yang belum bisa diperoleh saat terdapat pesanan TEFA khususnya apabila pada waktu libur dan diluar jam kerja wajib/lembur.
2. Efisiensi penggunaan dana BLUD
   - Masih ada beberapa program yang belum berjalan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas.
   - Keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah atau sumber pendanaan lain.

c. Hambatan dalam Kemitraan dan Teaching Factory (TEFA)

1. Jumlah produk unggulan Teaching Factory belum optimal
   - Keterbatasan dalam sumber daya manusia dalam bagian produksi dan quality control (QC) dalam kegiatan produksi hasil TEFA.
   - Produk belum sepenuhnya sesuai standar pasar, sehingga masih butuh perbaikan dalam kualitas dan pemasaran.

2. Kemitraan industri masih perlu diperluas
   - Kurangnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja.
   - Kurangnya peranan industri dalam hal pendampingan produksi TEFA yang selaras dengan produk industry tersebut.

d. Hambatan dalam Tata Kelola dan Mutu Layanan Pendidikan

1. Tingkat kepuasan siswa dan orang tua belum maksimal
   - Beberapa siswa merasa materi pembelajaran masih kurang relevan dengan dunia kerja.
   - Orang tua belum sepenuhnya memahami konsep BLUD di SMK, sehingga kurang mendukung program sekolah.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Akuntansi adalah BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat Provinsi Kepulauan Riau.

4.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas;
b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat Provinsi Kepulauan Riau adalah:

a) ***Basis Kas*** untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam ***Laporan Realisasi Anggaran***

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat Kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

b) ***Basis akrual*** untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam ***Neraca***

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

c) ***Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran*** berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

d) ***Basis akrual untuk neraca*** berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas;

4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengakuan dan pengukuran atas transaksi kejadian ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan ini adalah:

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.

Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD , adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

   Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat tahun 2025, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat Diterima pada Rekening Kas Umum. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum untuk seluruh transaksi setelah dilakukan pengesahan definitif bendahara. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan

mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

4.7 Kebijakan Akuntansi Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas secara umum diakui jika memenuhi kriteria:

a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.

4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari:

- Barang Konsumsi;
- Bahan untuk pemeliharaan;
- Suku cadang;
- Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
- Bahan baku;
- Barang dalam proses/setengah jadi;

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal; diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.

4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.

4.10 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah

menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

BAB V

RINCIAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang telah disusun BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini:

5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan – LRA

- Pendapatan merupakan total penerimaan sekolah yang berasal dari **Realisasi Pendapatan 2025:** Rp1.934.616.040,00.
- **Pencapaian:** Sangat signifikan (1.381,87%) dibandingkan anggaran awal yang hanya Rp140.000.000,00.
- **Komponen Utama:**
- **Pendapatan Asli Daerah (PAD) - BLUD:** Sebesar Rp1.677.216.040,00. Menariknya, porsi terbesar berasal dari **Hibah Terikat** (Rp1,67 Miliar), sementara pendapatan dari Jasa Layanan dan Kerja Sama pihak lain masih relatif kecil.
- **Pendapatan Transfer:** Sebesar Rp257.400.000,00 yang seluruhnya berasal dari **Dana BOS Reguler** (DAK Non-Fisik).

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	11,500,000.00	1,180,000.00	10.26	0
Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat	1,675,636,000.00	0,00	0,00	0
Pendapatan BLUD dari Hibah Tidak Terikat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	500,000.00	400,000.00	80	0,00
Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	0,00	40,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD dari APBN/APBD (Transfer DAK Non Fisik)	257,400,000.00	257,400,000.00	-	0

TOTAL PENDAPATAN BLUD	**1,945,036,000.00**	**259,008,879.00**	**13.32**	0

1. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Tahun 2025 sebesar Rp 1.180.000,00 atau 23,06% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 23.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

No	Unit Teaching Factory (TEFA)	Program/Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi 2024
1	**TEFA Akutansi**	Bank Mini	5.000.000	0	0	0
2	**TEFA Perkantoran**	Jasa penjualan Tiket dan pengetikan	1.000.000	0	0	0
3	**TEFA TKJ**	Service Komputer	2.000.000	0	0	0
4	**TEFA DKV**	Baleho, Photo dan Desain Gravis dan Video	5.000.000	1.180.000	23,6	0
5	**TEFA APHPi**	Pengolahan Ikan dan Budidaya Ikan	10.000.000	0	0	0

2. Pendapatan BLUD dari Hibah

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah Tahun 2025 sebesar Rp 0,00- atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 1,675,636,000.00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Hibah SPP/ Hibah Tidak Terikat	0	0	0	0
Hibah Kementerian/ Hibah Terikat	1,675,636,000.00	0,00	0%	0
Total Pendapatan BLUD dari Hibah	1,675,636,000.00	0,00	**0%**	**0**

3. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

Realisasi pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Tahun 2025 sebesar Rp 400.000,00 atau 80% lebih rendah dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 500.000,00,- dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Kerjasama Kantin	500,000.00	400.000,00	80%	0
Kerjasama Pihak BRKS	0	0	0%	0
Kerjasama Lainnya	0	0	0	0
Total Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	**500,000.00**	**400.000,00**		

4. Pendapatan BLUD dari APBD

Realisasi pendapatan BLUD dari APBD Tahun 2025 sebesar

Rp257.400.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp257.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Dana BOSP	257.400.000,00	257.400.000,00	100%	0
Total Pendapatan BLUD dari APBD	257.400.000,00	257.400.000,00	**100%**	**0**

5. Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

Realisasi pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp 0 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2024
Pendapatan BLUD Lain-lain yang Sah	0,00	40,000	0	0
Total Pendapatan BLUD dari Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	0,00	**40,00**	**0**	**0**

b. Belanja

1. Belanja Pegawai BLUD

Berupa Belanja Gaji & Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan BLUD dengan realisasi selama tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00 % dari total anggaran belanja pegawai BLUD yang sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Pegawai BLUD	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp 157.920.000,00- atau 92,94% dari total anggaran belanja barang dan jasa yang sebesar Rp 169.920.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Barang	87,356,200.00	88,731,965.00,00	101,57
Belanja Jasa	15,600,000.00	11.050.000,40	70,83
Belanja Pemeliharaan	14,920,000.00	12.320.000,00	82,57
Belanja Perjalanan Dinas	52,043,800.00	45,818,035.00	88,04
Total Belanja Barang dan Jasa BLUD	169.920.000	157.920.000,00	92,94%

3. Belanja Modal BLUD

Belanja modal BLUD terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp 99.480.000,00 atau 5,60% dari total anggaran belanja modal peralatan dan mesin yang sebesar Rp 185.500.000,- belanja modal gedung dan bangunan yang terealisasi sebesar Rp 0 atau 0,00% dari total anggaran belanja modal gedung dan bangunan yang sebesar Rp 1.568.036.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.500.000,00	99.480.000,00	5,60	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.568.036.000,00	0	0,00	0
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.580.000,00	21.580.000,00	100,00	0
Total Belanja Modal BLUD	1.775.116.000,00	99.480.000,00	5,60	**0**

5.2 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan saldo akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel di atas, Saldo Anggaran Lebih Awal pada tahun 2025 tercatat sebesar **Rp0,00**. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat saldo sisa dari tahun anggaran sebelumnya yang dibawa ke awal periode 2025.

2) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan digunakan dalam rangka membiayai defisit atau keperluan pembiayaan pada tahun anggaran berjalan. Untuk tahun anggaran 2025, nilai Penggunaan SAL tercatat sebesar **Rp0,00**, yang berarti tidak ada penggunaan saldo anggaran lebih awal untuk mendanai kegiatan di tahun 2025.

3) Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SiLPA tahun 2025 yang diperoleh dari realisasi tahun berjalan adalah sebesar **Rp 1.608.879,00,-**

4) Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan hasil penjumlahan dari Subtotal (Saldo Awal dikurangi Penggunaan SAL) ditambah dengan SiLPA/SiKPA tahun berjalan serta koreksi pembukuan. Nilai Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp 1.608.879,00,-**.

5.3 Neraca

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan dalam waktu 12 bulan atau berupa kas/setara kas. Aset Lancar yang dimiliki BLUD SMK Negeri 1 Bungurn Barat per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp 1.608.879,00,-**., yang terdiri dari:

a. Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan kas yang dikelola dalam rangka operasional Badan Layanan Umum Daerah. Berdasarkan neraca, saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp1.580.040,00**. *(Catatan: Rincian nomor rekening pada teks Anda sebelumnya perlu disesuaikan agar totalnya cocok dengan angka Rp1,58 juta ini).*

b. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional. Berdasarkan data neraca, saldo Persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp0,00**.

2. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan. Nilai Aset Tetap (Netto) per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp7.734.562.515,85**. Nilai ini merupakan nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan:

- **Tanah:** Rp1.449.000.000,00
- **Peralatan dan Mesin:** Rp847.666.253,00
- **Gedung dan Bangunan:** Rp3.478.876.000,00
- **Jalan, Jaringan, dan Irigasi:** Rp273.800.000,00
- **Aset Tetap Lainnya (Buku/Perpustakaan):** Rp1.776.326.600,00
- **Akumulasi Penyusutan:** (Rp91.106.337,15)

Uraian	Jumlah
TOTAL ASET	Rp7,736,142,555.85
TOTAL KEWAJIBAN	Rp0.00
TOTAL EKUITAS	Rp7,736,142,555.85

Uraian	Saldo per 31 Des 2025
Tanah	Rp1,449,000,000.00
Peralatan dan Mesin	Rp847,666,253.00
- Alat Kantor & Rumah Tangga	Rp830,566,253.00
- Alat Laboratorium	Rp2,100,000.00
- Komputer	Rp15,000,000.00
Gedung dan Bangunan	Rp3,478,876,000.00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp273,800,000.00
Aset Tetap Lainnya (Bahan Perpustakaan)	Rp1,776,326,600.00

3. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Berdasarkan neraca, BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat **tidak memiliki kewajiban (Rp0,00)** baik jangka pendek maupun jangka panjang per 31 Desember 2025.

4. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban. Karena tidak ada kewajiban, maka nilai ekuitas sama dengan nilai total aset.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp7.736.142.555,85**.

5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional

b) Beban dari kegiatan operasional

c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional

d) Pos luar biasa

e) Surplus/defisit LO

1. Pendapatan LO dari Kegiatan Operasional

Pendapatan LO dari kegiatan operasional terdiri dari:

a. **Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO**

Realisasi pendapatan BLUD dari Jasa Layanan LO tahun 2025 pada SMK Negeri 1 Bunguran Barat secara total adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan Unit Produksi/TEFA	1.580.000,00	0	100%	1.580.000,00
Total Pendapatan Jasa Layanan	1.580.000,00	0	100%	1.580.000,00

b. **Pendapatan BLUD dari Hibah LO**

Realisasi pendapatan BLUD dari Hibah LO Tahun 2025 sebesar Rp 1.675.636.000,00dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Hibah SPP / Lainnya	0	0	0	0
Hibah Kementerian	1.675.636.000,00	0	0,00%	1.675.636.000,00
Total Pendapatan Hibah LO	1.675.636.000,00	0	0,00%	1.675.636.000,00

c. **Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain LO**

Realisasi pendapatan dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain LO Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Kerjasama Kantin & Mitra	400.000,00	0	100%	400.000,00
Total Hasil Kerjasama	400.000,00	0	100%	400.000,00

d. Pendapatan BLUD dari APBD LO

Realisasi pendapatan dari Dana BOSP (APBD) LO Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan)
Dana BOSP	257.400.000,00	257.400.000,00	100 %	257.400.000,00
Total Pendapatan APBD	257.400.000,00	257.400.000,00	100 %	257.400.000,00

2. Beban dari Kegiatan Operasional

1. Belanja Pegawai BLUD LO

Realisasi beban pegawai (Gaji & Tunjangan) selama tahun 2025 adalah sebesar **Rp 0,00**.

2. **Belanja Barang dan Jasa BLUD**
   Beban barang dan jasa LO tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 1.759.872.399,15 dengan rincian:

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Kenaikan/ (Penurunan
Beban Barang	1.599.578.027,00	0	100 %	1.599.578.027,00
Beban Jasa	11.050.000,00	0	100 %	11.050.000,40
Beban Pemeliharaan	12.320.000,00	0	100 %	12.320.000,00
Beban Perjalanan Dinas	45.818.035,00	0	100 %	45.818.035,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	91.106.337,15	0	100 %	91.106.337,15
Total Beban Barang dan Jasa BLUD	1.759.872.399,15	**0**	100 %	- 1.759.872.399,15

3. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan dikelompokkan dalam kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat tahun 2025 sebesar Rp. **0,00**

4. Surplus/defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan beban. Pada tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat mencatat Defisit LO sebesar Rp **174.772.479,85**

5.5 Laporan Arus Kas

A. Laporan Arus Kas

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode

akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat pada Tahun 2025 sebesar Rp **1.934.616.040,00** yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.180.000,00	0
Pendapatan BLUD dari Hibah	0	0
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	400.000	0
Pendapatan BLUD dari APBN/APBD	257.400.000	0
Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	28.879,00	0
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	259.008.879,00	**0**

b. Arus Keluar Kas dari Aktifitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi BLUD SMK Negeri 1 Bungurn Baratselama Tahun 2025 sebesar Rp **157.920.000,00** terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pembayaran Pegawai	0,00	0,00
Pembayaran Barang dan Jasa	99.781.965,00	0,00
Pembayaran Pemeliharaan	12.320.000,00	0,00
Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	0,00	0,00

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		
Pembayaran Perjalanan Dinas	45.818.035,00	
Pembayaran Bunga	0,00	
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	**157.920.000,00**	**0,00**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp 1.380.180.423,60 Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	101.088.879,00	0,00

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset Non-Keuangan lainnya.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan di masa yang akan datang.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat pada Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan Aset Tetap Tanah	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		
Penjualan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	**0,00**	**0,00**

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi BLUD SMK Negeri 1 Bungurn Baratpada Tahun 2025 sebesar Rp **1.775.116.000,00**yang terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Perolehan Tanah	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	77.900.000,00	0,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	21.580.000,00	0,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	99.480.000,00	0.00

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah selisih dari Jumlah Arus Masuk Kas dikurangi dengan Jumlah Arus Keluar Kas sejumlah Rp (99.480.000,00) Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(99.480.000,00)	0

3. Kenaikan/Penurunan Kas Bersih Selama Periode 2025

Kenaikan/(penurunan) Kas Bersih Selama Periode Tahun 2025 merupakan akumulasi jumlah kenaikan/(penurunan) kas bersih dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris.

Selama Tahun Anggaran 2025 terjadi kenaikan/penurunan kas bersih sebesar Rp 1.608.879,00 yang terdiri dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp 1.608.879,00 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp (1.608.879,00). Perbandingan Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih tahun 2025 dan 2024 adalah:

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	1.608.879,00	0,00

Berikut :

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas di BLUD	1.608.879,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00)	0,00
Saldo Akhir Kas	1.608.879,00	**0,00**

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

a) Ekuitas awal
b) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti:
    1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
    2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas Akhir

a) Ekuitas Awal

Pada Tahun 2025 BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat mencatat ekuitas awal sebesar Rp 0,00 yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada laporan Tahun 2025. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jumlah Aset Tahun 2024 Rp 0,00
- Jumlah Kewajiban Tahun 2024 Rp 0,00
- **Saldo Awal Ekuitas 2024 Rp 0,00**

b) Surplus/Defisit LO

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dalam Laporan Operasional Tahun 2025 tercatat sebesar Rp 174.743.640.85.

c) Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar Rp 7.736.142.555,85 merupakan saldo kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Total Aset dan Total Kewajiban BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat Tahun 2025.

- Jumlah Aset Tahun 2025 Rp 7.736.142.555,85
- Jumlah Kewajiban Tahun 2025 Rp 0,00
- Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (Rp(0,00)
- **Saldo Awal Ekuitas 2025 Rp 0,00**

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat merupakan entitas pelayanan publik yang ditetapkan secara legal-formal sebagai unit pelaksana teknis daerah dengan pola pengelolaan keuangan khusus. Pembentukan dan legitimasi operasional instansi ini didasarkan pada *Peraturan Daerah (Perda) No.- Tahun 2024*, yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Secara geografis dan administratif, BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat berkedudukan strategis dengan titik pusat operasional yang beralamat di **Jl. Panglima Hujan, Pantai Ria, Sedanau**. Lokasi ini berfungsi sebagai hub layanan pendidikan vokasi bagi masyarakat di wilayah Bunguran Barat dan sekitarnya.

Sebagai organisasi perangkat daerah yang bersifat nirlaba (*non-profit oriented*), instansi ini mengemban mandat fundamental dalam menyediakan layanan jasa pendidikan yang bermutu. Fokus utamanya adalah eskalasi kesejahteraan rakyat melalui pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif, dengan sasaran pembangunan yang terukur dan terintegrasi di dalam **Rencana Strategis (Renstra) BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat**. Seluruh kerangka kebijakan operasional dan manajerial yang diterapkan merupakan manifestasi nyata dalam mengakselerasi pencapaian **Visi dan Misi Kepala BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat**, guna mewujudkan tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*outcome-based*).

6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat merupakan entitas organisasional di bawah naungan Pemerintah Daerah yang merepresentasikan artikulasi **Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)** dengan orientasi **nirlaba (*non-profit***

***oriented*)**. Sebagai institusi yang mengadopsi pola pengelolaan keuangan fleksibel, entitas ini mendedikasikan fungsi fundamentalnya pada penyediaan layanan publik ekselen di sektor pendidikan vokasi. Implementasi operasional BLUD ini difokuskan pada akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui parameter pembangunan yang bersifat **terukur, sistematis, dan terintegrasi** di dalam **Rencana Strategis (Renstra) BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat**. Dokumen strategis tersebut berfungsi sebagai instrumen pemandu (*guiding tool*) dalam menjamin koherensi antara kebijakan manajerial dengan realisasi sasaran pembangunan daerah. Secara substansial, seluruh aktivitas sosioreligius dan teknokratis yang dilaksanakan merupakan manifestasi amanat organisasional untuk mengaktualisasikan **Visi dan Misi Kepala BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat**, guna menciptakan *multiplier effect* bagi pembangunan sumber daya manusia yang kompetitif dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2024 disusun sebagai bentuk tanggung jawab BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, penyusunan laporan keuangan BLUD juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

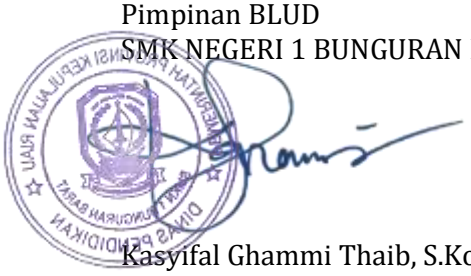
Secara umum pencapaian kinerja atas sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik, namun begitu masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang masih harus terus dibenahi dan menjadi perhatian oleh BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat.

Dengan memperhatikan strategisnya peran sekolah dan besarnya tantangan yang dihadapi untuk mendukung Visi Misi Pendidikan Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, SMK Negeri 1 Bunguran Barat Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja serta memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan industri. Melalui pendekatan berbasis kompetensi, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta pengelolaan keuangan yang transparan melalui sistem BLUD, sekolah ini berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan lulusan SMK dapat menjadi tenaga kerja yang unggul dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Akhir kata, BLUD SMK Negeri 1 Bunguran Barat Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan dalam penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban kami dalam menyajikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

Kepulauan Riau, 25 Mei 2026

Pimpinan BLUD
SMK NEGERI 1 BUNGURAN BARAT



Kasyifal Ghammi Thaib, S.Kom
NIP. 198102182009031004